https://jdih.pemalangkab.go.id

BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan wujud tanggung jawab moral dan etika penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta sebagai pedoman arah pembangunan daerah yang berlandaskan nilai-nilai visi Kabupaten Pemalang Bersih, Cakap, Handal, dan Mulia guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berdaya saing, dan berkeadilan;

b. bahwa penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 diperlukan untuk menjawab dinamika kebutuhan masyarakat, tantangan pembangunan daerah, serta aspirasi publik terhadap peningkatan pelayanan yang efektif, efisien, dan partisipatif, sejalan dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setelah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maka seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan kemudian disahkan;

https://jdih.pemalangkab.go.id

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

https://jdih.pemalangkab.go.id

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai 2029.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai penjabaran operasional tujuan dan sasaran Daerah dalam bentuk program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk:

a. merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan Perangkat Daerah;
b. merumuskan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, strategi dan arah kebijakan serta rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Daerah; dan
c. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB II

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. pendahuluan;
b. gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
c. tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
d. program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
e. penutup.

Pasal 5

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
    a. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang;
    b. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;
    c. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pemalang;
    d. Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang;
    e. Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;
    f. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;
    g. Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang;
    h. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
    i. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang;
    j. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;
    k. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang;

https://jdih.pemalangkab.go.id

l. Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang;

m. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang;

n. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang;

o. Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang;

p. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;

q. Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang;

r. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang;

s. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pemalang;

t. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pemalang;

u. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang;

v. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Pemalang;

w. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang;

x. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang;

y. Renstra Kecamatan Pemalang;

z. Renstra Kecamatan Taman;

aa. Renstra Kecamatan Petarukan;

bb. Renstra Kecamatan Comal;

cc. Renstra Kecamatan Ampelgading;

dd. Renstra Kecamatan Bodeh;

ee. Renstra Kecamatan Ulujami;

ff. Renstra Kecamatan Bantarbolang;

gg. Renstra Kecamatan Randudongkal;

hh. Renstra Kecamatan Warungpring;

ii. Renstra Kecamatan Moga;

jj. Renstra Kecamatan Pulosari;

kk. Renstra Kecamatan Belik; dan

ll. Renstra Kecamatan Watukumpul.

https://jdih.pemalangkab.go.id

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 21 Oktober 2025

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

ANOM WIDIYANTORO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 21 Oktober 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

ttd
cap

ENDRO JOHAN KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pemalang,

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 197810292006041008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

A. RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD), yang mengacu kepada RPJPD Kabupaten Pemalang, RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJM Nasional. RPJMD Kabupaten Pemalang menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan di setiap Organisasi Perangkat Daerah, yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Strategis masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah wajib membuat dokumen lima tahunan berupa Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang akan dicapai.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra memiliki peran strategis penting bagi perangkat daerah. Renstra menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, serta instrumen untuk mengukur kinerja Perangkat Daerah.

Sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Acuan yang lain adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2030.

Rencana Strategis menjadi kunci yang akan menunjukan penjabaran kebijakan melalui rencana-rencana yang sangat prioritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, karena itu rencana - rencana dimaksud disertai dengan target yang harus dipenuhi dan dipertanggung jawabkan pencapaiannya, sehingga secara nyata kebijakan yang diambil dapat diketahui pula pencapaiannya, dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara akuntabel.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sejalan dengan itu penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa menjadi cita-cita dan harapan setiap warga negara, tuntutan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik "*Good Governance*" yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, efisien dan efektif yakni dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Dengan demikian kepemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap, prilaku dan kebijakan yang dibuat baik secara politik, hukum, maupun ekonomi dan di informasikan secara terbuka kepada publik.

Mewujudkan °"*Clean and Good Governance*" merupakan tantangan yang harus dipenuhi oleh pemerintah sehingga keinginan masyarakat terhadap pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat menjadi kenyataan. Langkah yang perlu dan harus dikembangkan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik adalah penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan legitimasi, sehingga penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam rangka itu, cara pengelolaan pemerintah dan pembangunan yang perlu dilakukan adalah membangun perubahan secara bersama-sama baik perubahan sektor pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Perwujudan *good* governance dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Pemalang, memerlukan tenaga yang memiliki kompetensi dan profesionalisme serta kinerja yang tinggi. Seluruh pegawai Sekretariat Daerah harus merespon perubahan lingkungan dan perkembangan wilayah yang demikian cepat, mampu menanggapi kebutuhan dan keinginan semua kalangan sehingga bisa memberikan kepuasan layanan pada masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas yang diemban kepadanya. Dalam pelaksanaan tugas, Sekretariat Daerah juga memiliki keterkaitan dengan Kementerian dan Lembaga maupun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meskipun tidak secara langsung yang secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dimana sama-sama berkeinginan mewujudkan tata pemerintahan yang baik, mengedepankan efisiensi dan efektifitas serta pelayanan prima kepada masyarakat.
b. Peningkatan akuntabilitas dan level maturitas Lembaga, upaya perbaikan kualitas layanan harus memiliki indicator yang jelas sehingga dapat dibandingkan kinerjanya dari waktu ke waktu, yang ditunjukkan dalam akuntabilitas kinerja maupun penilaian peringkat level kelembagaan.
c. Harmonisasi produk hukum dengan peraturan perundangan yang berlaku, dimana dalam memberikan pelayanan prima, semua instansi tetap berdasarkan pada peraturan peraturan perundangan yang berlaku.

Oleh karena itu, Rencana Strategis tersebut minimal harus mencakup kebijakan, strategi dan program pembangunan yang perlu dilakukan untuk dapat mensinergikan sumber daya dan potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki. Sumber daya tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial. Kemampuan pemerintah Kabupaten Pemalang dalam mengelola seluruh potensi yang ada akan sangat menentukan perkembangan Kabupaten Pemalang ke arah yang diinginkan.

Proses penyusunan Rencana Strategis harus mempertimbangkan kebutuhan penggunaan sumber daya untuk menyelesaikan isu-isu dan permasalahan strategis yang telah teridentifikasi. Oleh karena itu, Proses penyusunan Rencana Strategis ini memerlukan keterlibatan dari seluruh *stakeholder* yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun external organisasi. Keterlibatan semua pihak di dalam pembuatan rencana strategis diharapkan dapat meningkatkan fokus pencapaian kinerja organisasi, menumbuhkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah disusun dan disepakati bersama serta meningkatan akuntabilitas dan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tahapan proses penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah. Tahap ini dilakukan dengan:
   a. Membentuk tim Penyusun Renscana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang 2025-2029 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 100.3.3.2/37/2025 tanggal 24 Januari 2025 Tentang: Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029;
   b. Melaksanakan orientasi mengenai Renstra untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renstra Setda;
   c. Menyusun tata kala sebagai panduan kerja; dan
   d. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renstra Setda.
2. Penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Sekretariat Daerah Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap gambaran pelayanan Setda, analisis permasalahan, penelahaan dokumen Renstra Kementerian Dalam Negeri, analisis isu strategis, dan perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja.
3. Penyusunan rancangan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Rancangan Renstra Setda adalah penyempurnaan rancangan awal Renstra Setda yang dilakukan berdasarkan Surat Edaran Bupati Pemalang Nomor: 100.3.4.2/1321/Tahun 2025 tanggal 19 Mei 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.
4. Penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis Sekretariat Daerah. Tahap ini merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Sekretariat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Setda dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

https://jdih.pemalangkab.go.id

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
21. Inpres No 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2030;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor .... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;

https://jdih.pemalangkab.go.id

32. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor ... Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
34. Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. MAKSUD

Maksud Penyusunan Rencana Strategis mempunyai maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

1.3.2. TUJUAN

Adapun penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang bertujuan untuk:

a. Menjamin keselarasan dengan dokumen RPJMD dengan menjadikan Renstra Sekretariat Daerah acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah ;
b. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.

Tujuan tersebut didokumentasikan dalam suatu dokumen perencanaan yang memuat berbagai konsep perencanaan yang komprehensif dan operasional sesuai dengan kondisi wilayah dan diharapkan dapat menjadi alternatif tindak lanjut pemecahan agenda pembangunan secara bertahap, terencana dan terarah dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1.4 SISTIMATIKA PENULISAN.

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan informasi umum terkait Latar Belakang, Landasan Hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan informasi terkait Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Kabupaten Pemalang, Sumber daya yang dimiliki yang terdiri dari sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki, Kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada Sekretariat Daerah, Kelompok sasaran

https://jdih.pemalangkab.go.id

pelayanan perangkat daerah, Identifikasi Permaslaahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah, dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menyajikan informasi terkait Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang yang ingin dicapai guna mendukung pencapaian sasaran daerah, Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang sebagai rumusan kondisi dalam menjabarkan pencapaian tujuan perangkat daerah, Strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang yang menjelaskan rencana tindakan komprehensif berupa pentahapan pencapaian, pengalokasian dan penggunaan sumberdaya guna pencapaian tujuan dan sasaran, selain itu juga menyajikan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB VI PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan Program , Kegiatan, Dan Sub Kegiatan yang dipilih untuk mendukung pencapaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Rencana Pendanaan yang dibutuhkan untuk pencapaian hal tersebut, serta kinerja yang hendak dicapai untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

BAB V PENUTUP

https://jdih.pemalangkab.go.id

B A B II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

1. Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah

Pembentukan Sekretariat Daerah mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, susunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Pemalang 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, susunan Sekretariat Daerah Kabupaten. Adapun kedudukan, tugas, dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang diatur melalui Peraturan Bupati Pemalang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.

Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dan menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah.

Sedangkan fungsi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah ;
b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
d. Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi daerah; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari unsur sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari **:**
   2.1 Bagian Tata Pemerintahan
   2.2 Bagian Kesejahteraan Rakyat
   2.3 Bagian Hukum
3. Asisten Ekonomi Pembangunan terdiri dari :
   3.1 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
   3.2 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, didalamnya membawahi

https://jdih.pemalangkab.go.id

4. Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
   4.1 Bagian Organisasi
   4.2 Bagian Perencanaan dan Keuangan, didalamnya membawahi:
   b. Sub Bagian Keuangan
   4.1 Bagian Umum, di dalamnya membawahi:
      a. Subbagian Tata Usaha;
      b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
      c. Subbagian Protokol.
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Sekretariat Daerah dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:

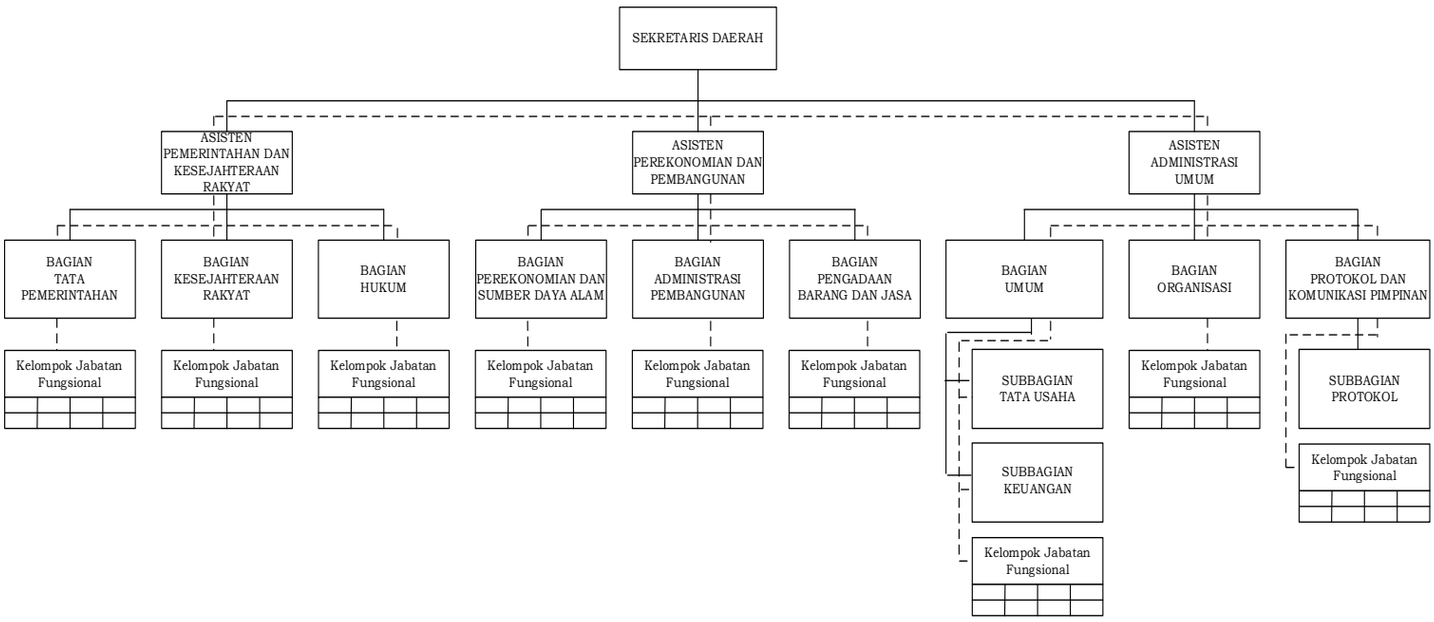

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.2. SUMBER DAYA SEKRETARIAT DAERAH

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan kualitas SDM aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah kabupaten Pemalang, maka telah dilaksanakan bimbingan teknis, sosialisasi maupun workshop baik untuk aparat maupun masyarakat umum. Gambaran pengembangan SDM yang telah dilaksanakan selama tahun 2021-2025 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Realisasi Pengembangan SDM Tahun 2022-2024
Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang

No	PENGEMBANGAN KOMPETENSI YANG DILAKSANAKAN	Pelaksanaan		
		2022	2023	2024
1	BagianUmum		1. Sosialisasi Penatausahaan Keuangan dengan menggunakan Aplikasi SIPD RI 2023 2. Sosialisasi Penatausahaan Keuangan dengan menggunakan Aplikasi SIPD RI dan Aset Daerah 2023 3. Bimbingan Teknis Pengisian Aplikasi SIMPEG dan EKIN 2023 4. Bimbingan Teknis Pengisian Aplikasi Penomoran Surat Rahasia.	1. Sosialisasi Penatausahaan Keuangan dengan menggunakan Aplikasi SIPD RI 2024 2. Sosialisasi Penatausahaan Keuangan dengan menggunakan Aplikasi SIPD RI dan Aset Daerah 2024 3. Bimbingan Teknis Implementasi Aplikai SRIKANDI
2	Bagian Prokompim	1. Bimbingan Teknis Keprotokolan dan MC Tingkat Kabupaten Pemalang	1. Bimbingan Teknis Digitalisasi Layanan Kepegawaian 2. Professional English Training 3. Bimbingan Teknis Penggunaan	1. Bimbingan Teknis Foto Jurnalistik 2. Bimbingan Teknis Implementasi Keprotokolan Indonesia pada Penyelenggaraan Acara di Daerah 3. Bimbingan Teknis Aplikasi Srikandi

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	PENGEMBANGAN KOMPETENSI YANG DILAKSANAKAN	Pelaksanaan		
		2022	2023	2024
			Aplikasi Ki Dalang	4. Bimbingan Teknis Etika & Keprotokolan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah
3	Bagian Organisasi			1. Bimbingan Teknis Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Tahun 2024 2. Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang 3. Bimbingan Teknis Implementasi SAKIP Tahun 2024
4	Bagian Perekonomian dan SDA			1. Bintek Pengelolaan BUMD Air Minum 2. Bintek TOT Insan Perintis Keuangan OJK Tahun 2024 3. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemda dan BUMD Air Minum dengan Tema Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum dan Evaluasi BUMD Air Minum dalam Penetapan Tarif PCR sesuai Permendagri 21 Tahun 2020
5	Bagian Admnistrasi Pembangunan		1. Bimbingan Teknis Penyusunan dan Implementasi Analisis Standar Belanja Fisik	1. Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	PENGEMBANGAN KOMPETENSI YANG DILAKSANAKAN	Pelaksanaan		
		2022	2023	2024
			dan Non fisik sesuai dengan SIPD/SIPD-RI 2. Bimbingan Teknis Sosialisasi dan Pengisian Data Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Pemalang	dan Tematik Tahun 2024 2. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 3. Bimbingan Teknis Implementasi SAKIP Tahun 2024 4. Bimbingan Teknis Pengelolaan Satu Data e-walidata dan informasi geospasial
6	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bimbingan Teknis Pengadaan Langsung Melalui Aplikasi BLANGKON JATENG	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Lelang Jasa Parkir	Bimbingan Teknis Implementasi E-Katalog Versi 6.0
7	Bagian Tata Pemerintahan	1. Pembinaan Kelurahan 2. Bimbingan Teknis mengenai Pemetaan Urusan Pemerintahan Dalam Rangka Kerja Sama Daerah 3. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Nama Rupa Bumi 4. Bimbingan Teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sesuai Permendagri 59 Tahun 2021	1. Bimbingan Teknis Entry Data LKPJ ATA 2022 2. Bimbingan Penyusunan LPPD Kab. Pemalang Tahun 2023	1. Pembekalan Teknis dan Administrasi Tim Sekretariat Desk Pilkada Tahun 2024 2. Bimbingan Teknis Entry Data LKPJ ATA 2023 3. Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Nama Rupabumi bagi Surveyor Konfiemasi dan Verifikasi Hasil EPPD Tahun 2024
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat			
9	Bagian Hukum			1. Bimbingan Teknis Pengembangan

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	PENGEMBANGAN KOMPETENSI YANG DILAKSANAKAN	Pelaksanaan		
		2022	2023	2024
				Kompetensi Analis Hukum: *Teknik Evaluasi Peraturan Perundang-undangan* 2. Bimbingan Teknis Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Tahun 2024 3. FGD *knowledge sharing* Dokumentasi Hukum Adat 4. Training of trainer Partisipasi Publik Rancangan Peraturan Presiden Kepatuhan Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pelaksanaan Hukum. 5. Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Rincian pegawai berdasarkan eselon jabatan dan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana tabel di bawah ini :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.2

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon
Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2025

NO	Uraian	Eselon								Staf		Fungsional		Jumlah		Jumlah Total
		I		II		III		IV								
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Sekretaris Daerah			1										1	0	1
2	Staf Ahli			2										2	0	2
3	Asisten			3										3	0	3
4	Bagian Tata Pemerintahan					1			2	2	4			3	6	9
5	Bagian Hukum					1				2	1	6	3	9	4	13
6	Bagian Perkonomian dan SDA					1					4	1	2	2	6	8
7	Bagian Administrasi Pembangunan					1				4	4	1	1	6	5	11
8	Bagian Kesra					1				3	2	1	1	5	3	8
9	Bagian Organisasi						1					1	5	1	6	7
10	Bagian PBJ					1				5	7	8	5	14	12	26
11	Bagian Prokompim							1		3	1	1	1	5	2	7
12	Bagian Umum					1		1	1	42	13			44	14	58
	Jumlah	**0**	**0**	**6**	**0**	**7**	**1**	**2**	**3**	**61**	**36**	**19**	**18**	**95**	**58**	**153**

Adapun jenjang pendidikan yang dimiiki ASN Sekretariat Daerah dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.3

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan
Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2025

No	Uraian	S3		S2		S1/D4		D3		SLTA		SMP		SD		Jumlah		Jumlah Total
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Sekretaris Daerah			1												1	0	1
2	Staf Ahli			2												2	0	2
3	Asisten	1		2												3	0	3
4	Bagian Tata Pemerintahan			1		1	6			1						3	6	9
5	Bagian Hukum			1	1	7	3			1						9	4	13
6	Bagian Perkonomian dan SDA			2	1		4		1							2	6	8
7	Bagian Administrasi Pembangunan	0	0	2	1	1	4	0	0	3	0	0	0	0	0	6	5	11

https://jdih.pemalangkab.go.id

8	Bagian Kesra			1	1	2					1					3	2	5
9	Bagian Organisasi			1	2	1	5									2	7	9
10	Bagian PBJ			3	1	10	11			1						14	12	26
11	Bagian Prokompim				1		2		4							0	7	7
12	Bagian Umum			1	2	8	7		1	29	4	4		2		44	14	58
Jumlah		**1**	**0**	**17**	**10**	**30**	**42**	**0**	**6**	**35**	**5**	**4**	**0**	**2**	**0**	**89**	**63**	**152**

Dari segi pendidikan, yang memiliki pendidikan S3 sebanyak 1 (satu) orang, S2 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, S1 sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang, D3 sebanyak 6 (enam) orang, SLTA sebanyak 41 (empat puluh satu) orang, SLTP sebanyak 4 (empat) orang dan SD sebanyak 2 (dua) orang. Dengan demikian ASN pada Sekretariat Daerah paling banyak memiliki pendidikan S1, namun demikian masih diperlukan optimalissasi penempatan pegawai sehingga dapat memenuhi prinsip meritokrasi atau personil yang tepat pada tempat yang tepat, sehingga akan bisa memudahkan dalam pencapaian kinerja Perangkat daerah.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan tugas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang, pada tahun 2024 dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut :

a. Bagian Tata Pemerintahan

Tabel 2.4

SARANA DAN PRASARANA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
TAHUN 2024

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	Kondisi
1	Bagian Tata Pemerintahan		
	Alat-alat Angkutan	15	
	- Station Wagon	1	Baik
	- Sepeda Motor	14	Baik
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1	
	- Global Positioning System	1	Baik
	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	- Lemari Besi	1	Baik
	- Filling Besi/Metal	12	Baik
	- Band Kas	1	Baik
	- Lemari Kaca	5	Baik
	- Alat Penghancur Kertas	1	Baik
	- Overhead Projektor	1	Baik
	- Lemari Kayu	1	Baik
	- Meja Rapat	1	Baik
	- Kursi Tamu	1	Baik
	- AC Unit	2	Baik
	- AC Split	5	Baik
	- Televisi	3	Baik
	- Wireless	1	Baik
	- Camera Video	1	Baik
	- Alat Pemadam Portable	2	Baik
	- P.C Unit	2	Baik

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	Kondisi
	- Lap Top	6	Baik
	- Note Book	3	Baik
	- Hard Disk	2	Baik
	- Scanner	1	Baik
	- Printer	10	Baik
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	10	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	Baik
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	3	Baik
	- Proyektor + Attachment	1	Baik
	- Handy Talky	2	Baik

b. Bagian Hukum.

Tabel 2.5

SARANA DAN PRASARANA BAGIAN HUKUM
TAHUN 2024

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	Kondisi
1	Bagian Hukum		
	Alat-alat Angkutan	8	Baik
	- Station Wagon	2	Baik
	- Sepeda Motor	6	Baik
	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	- Lemari Besi	2	Baik
	- Mesin Ketik Manual Standard	1	Baik
	- Rak Besi/Metal	2	Baik
	- Filling Besi/Metal	3	Baik
	- Band Kas	1	Baik
	- Kardek Besi/ Metal	1	Baik
	- Lemari Sorok	1	Baik
	- Lemari Kaca	1	Baik
	- Alat Penghancur Kertas	2	Baik
	- Papan Nama Instansi	1	Baik
	- White Board	1	Baik
	- Overhead Projektor	1	Baik
	- Sun Box Speaker	1	Baik
	- Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1	Baik
	- Meja Kayu/Rotan	2	Baik
	- Meja Rapat	2	Baik
	- Meja Tulis	2	Baik
	- Meja Tambahan	1	Baik
	- Meja Komputer	2	Baik
	- Kursi Rapat	2	Baik
	- Kursi Tamu	1	Baik
	- Kursi Biasa	4	Baik
	- Kursi lipat	1	Baik
	- Jam Elektronik	1	Baik
	- Jam Mekanis	1	Baik
	- AC Unit	6	Baik
	- AC Split	1	Baik
	- Kipas Angin	1	Baik
	- Exhause Fan	2	Baik
	- Televisi	1	Baik
	- Sound System	1	Baik
	- Camera Video	1	Baik

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	Kondisi
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	Baik
	- Personal Komputer Lain-lain	1	Baik
	- P.C Unit	18	Baik
	- Lap Top	8	Baik
	- Note Book	2	Baik
	- CPU	2	Baik
	- Printer	14	Baik
	- Scanner	2	Baik
	- Printer	3	Baik
	- Scanner	2	Baik
	- Router	2	Baik
	- Hub	1	Baik
	- Peralatan Jaringan Lain-lain	1	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	3	Baik
	- Lemari Buku untuk Perpustakaan	4	Baik
	- Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	3	Baik
	- Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	3	Baik
	- Buffet Kayu	1	Baik
	- Buffet Kaca	1	Baik
	Alat Studio dan Alat Komunikasi		
	- Camera + Attachment	1	Baik
	- Proyektor + Attachment	2	Baik
	- Unintemuptible Power Supply (UPS)	2	Baik
	- Audio Cassete Recorder	1	Baik
	- Microphone Table stand	2	Baik
	- Camera Electronic	4	Baik
	- Intermediate Telephone/ Key Telephone	1	Baik
	- Pesawat Telepon	1	Baik
	- Video Tape Recorder Portable	1	Baik
	- Layar Film	1	Baik
	- Facsimile	1	Baik

c. Bagian Kesra

Tabel 2.6

SARANA DAN PRASARANA BAGIAN KESRA
TAHUN 2024

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
1	Bagian Kesejahteraan Rakyat		
	Alat-alat Angkutan	5	
	- Station Wagon	1	Baik
	- Sepeda Motor	4	Baik
	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	- Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	Baik
	- Filling Besi/Metal	4	Baik
	- Band Kas	1	Baik
	- Lemari Kayu	3	Baik
	- Kursi Putar	2	Baik
	- Meja Biro	1	Baik
	- AC Unit	3	Baik
	- Handy Cam	1	Baik
	- Personal Komputer Lain-lain	2	Baik
	- P.C Unit	2	Baik
	- Lap Top	6	Baik
	- Personal Komputer Lain-lain	2	Baik

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
	- Printer	3	Baik
	- Monitor	1	Baik
	- Printer	7	Baik
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	14	Baik
	- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	Baik
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5	
	- Camera + Attachment	1	Baik
	- Proyektor + Attachment	1	Baik
	- Unintemuptible Power Supply (UPS)	3	Baik

d. Bagian Administrasi Pembangunan

Tabel 2.7

SARANA DAN PRASARANA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
TAHUN 2024

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	Kondisi
1	Bagian Administrasi Pembangunan		
	- Transportable Electric Generating Set	1	Baik
	- Station Wagon	1	Baik
	- Sepeda Motor	9	Baik
	- Peralatan Las Listrik	3	Baik
	- Water Pas	2	Baik
	- ALat Ukur Universal Lain-lain	2	Baik
	- ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	5	Baik
	- Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	Baik
	- Lemari Besi	5	Baik
	- Filling Besi/Metal	8	Baik
	- Band Kas	1	Baik
	- Alat Penghancur Kertas	1	Baik
	- Mesin Absensi	2	Baik
	- Zice	1	Baik
	- Meja Rapat	1	Baik
	- Kursi Tamu	1	Baik
	- Kursi Putar	1	Baik
	- Meja Biro	2	Baik
	- AC Unit	5	Baik
	- Dispenser	1	Baik
	- Handy Cam	1	Baik
	- P.C Unit	2	Baik
	- Lap Top	2	Baik
	- Note Book	10	Baik
	- Personal Komputer Lain-lain	3	Baik
	- Hard Disk	1	Baik
	- Printer	2	Baik
	- Monitor	1	Baik
	- Printer	4	Baik
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	Baik
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	12	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
	- Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	1	Baik
	- Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2	Baik

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	Kondisi
	- Camera Electronic	2	Baik
	- Film Projector	1	Baik
	- Camera Vertikal	1	Baik

e. Bagian Perekonomian dan SDA

Tabel 2.8

SARANA DAN PRASARANA BAGIAN PEREKONOMIAN Dan SDA
TAHUN 2024

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
1	Bagian Perekonomian dan SDA		
	Alat-alat Angkutan		
	- Station Wagon	1	Baik
	- Sepeda Motor	9	Baik
	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	- Filling Besi/Metal	10	Baik
	- Band Kas	1	Baik
	- Lemari kayu	2	Baik
	- Alat Penghancur Kertas	1	Baik
	- Meja Rapat	1	Baik
	- Meja Tulis	1	Baik
	- Meja Komputer	2	Baik
	- AC Unit	8	Baik
	- Televisi	2	Baik
	- Wireless	1	Baik
	- Handy Cam	1	Baik
	- Lap Top	14	Baik
	- Personal Komputer Lain-lain	2	Baik
	- Printer	5	Baik
	- Printer	6	Baik
	- Scanner	1	Baik
	Alat Studio dan Alat Komunikasi		
	- Proyektor + Attachment	3	Baik
	- Camera Film	5	Baik
	- Handy Talky	1	Baik
	- Peralatan Antena SHF/Parabola Lain-lain	1	Baik

f. Bagian Umum

Tabel 2.9

SARANA DAN PRASARANA BAGIAN UMUM
TAHUN 2024

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	
	- Portable Generating Set	2	Baik
	- Stationary Generating Set	1	Baik
	- Portable Water Pump	1	Baik
	- Sumersible Pump	4	Baik

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	
	- Sedan	2	Baik
	- Station Wagon	27	Baik
	- Bus (Penumpang 30 Orang ke atas)	2	Baik
	- Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	3	Baik
	- Sepeda Motor	56	Baik
	- Sepeda	7	Baik
	- Mesin Kompresor	1	Baik
	- Mesin Gergaji	1	Baik
	- Scanner	3	Baik
	- Air Conditioning Unit	13	Baik
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.360	
	- Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	3	Baik
	- Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	Baik
	- Mesin Ketik Elektronik	1	Baik
	- Mesin Penghitung Uang	1	Baik
	- Mesin Foto Copy dengan Kertas doble Folio	1	Baik
	- Lemari Besi	4	Baik
	- Rak Besi/Metal	8	Baik
	- Rak Kayu	2	Baik
	- Filling Besi/Metal	21	Baik
	- Band Kas	2	Baik
	- Lemari Kaca	3	Baik
	- Lemari kayu	7	Baik
	- Alat Penghancur Kertas	7	Baik
	- White Board	19	Baik
	- Mesin Absensi	4	Baik
	- Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	4	Baik
	- Papan Struktur	6	Baik
	- Lemari Kayu	23	Baik
	- Meja Kayu/Rotan	1	Baik
	- Kursi Besi/Metal	3	Baik
	- Kursi Kayu/Rotan/Bambu	13	Baik
	- Tempat Tidur Kayu (lengkap)	19	Baik
	- Meja Rapat	26	Baik
	- Meja Tulis	43	Baik
	- Meja Makan	16	Baik
	- Meja Podium	2	Baik
	- Meja Reseption	1	Baik
	- Meja Tambahan	12	Baik
	- Meja Bundar	2	Baik
	- Kursi Rapat	260	Baik
	- Kursi Tamu	17	Baik
	- Kursi Putar	8	Baik
	- Kursi Biasa	19	Baik
	- Kursi Lipat	10	Baik
	- Meja Komputer	10	Baik
	- Kasur	19	Baik
	- Meja Piket	3	Baik
	- Tikar	1	Baik
	- Meja Biro	12	Baik
	- Sofa	17	Baik
	- Lemari Pakaian	22	Baik
	- MOUBILER LAINNYA	9	Baik
	- MOUBILER LAINNYA	1	Baik
	- Jam Mekanis	2	Baik
	- Mesin Penghisap Debu	2	Baik
	- Mesin Potong Rumput	1	Baik
	- Mesin Cuci	6	Baik
	- Alat Pembersih Lain-lain	4	Baik

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	
	- Lemari Es	12	Baik
	- AC Sentral	1	Baik
	- AC Unit	57	Baik
	- AC Split	45	Baik
	- Kipas Angin	18	Baik
	- Exhause Fan	8	Baik
	- Alat Pendingin Lain-lain	2	Baik
	- Kompor Gas	12	Baik
	- Alat Dapur Lainnya	3	Baik
	- Oven Listrik	3	Baik
	- Kitchen Set	31	Baik
	- Alat Dapur Lain-lain	1	Baik
	- Kitchen Set	26	Baik
	- Tempat Sampah	20	Baik
	- Alat Pemanas	2	Baik
	- Televisi	45	Baik
	- Cassette Recorder	1	Baik
	- Amplifiler	4	Baik
	- Equalizer	2	Baik
	- Loudspeaker	21	Baik
	- Sound System	2	Baik
	- Karaoke	2	Baik
	- Mic Conference	12	Baik
	- Unit Power Supply	6	Baik
	- Stabilisator	1	Baik
	- Camera Video	1	Baik
	- Camera Film	12	Baik
	- Tustel	2	Baik
	- Aquarium	3	Baik
	- Kaca Hias	2	Baik
	- Dispenser	27	Baik
	- Gucci	2	Baik
	- Handy Cam	2	Baik
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	36	Baik
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	6	Baik
	- Personal Komputer Lain-lain	3	Baik
	- P.C Unit	27	Baik
	- Lap Top	27	Baik
	- Note Book	10	Baik
	- Personal Komputer Lain-lain	6	Baik
	- Hard Disk	4	Baik
	- Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	1	Baik
	- Printer	40	Baik
	- Scanner	1	Baik
	- Monitor	7	Baik
	- Printer	12	Baik
	- Scanner	1	Baik
	- Peralatan Personal Komputer Lain-lain	5	Baik
	- Server	1	Baik
	- Hub	1	Baik
	- Modem	3	Baik
	- Peralatan Jaringan Lain-lain	1	Baik

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	
	- Meja Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walokota	1	Baik
	- Meja Kerja Eselon I/Wakil Gubernur/Bupati/Walikota	1	Baik
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Baik
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Baik
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	15	Baik
	- Meja Kerja Pejabat Lain-lain	5	Baik
	- Meja Tamu Ruangan Biasa	2	Baik
	- Meja Rapat Pejabat Lain-lain	1	Baik
	- Kursi Kerja Eselon I/Wakil Gubernur/Bupati/Walikot	1	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	14	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	9	Baik
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	8	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	10	Baik
	- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Baik
	- Kursi Tamu di Ruangan Menteri/Gubernur/Bupati/Wali	1	Baik
	- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	9	Baik
	- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	2	Baik
	- Lemari Buku untuk Perpustakaan	3	Baik
	- Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	11	Baik
	- Buffet Kayu	2	Baik
	- Camera + Attachment	3	Baik
	- Proyektor + Attachment	3	Baik
	- Microphone/Wireless Mic	14	Baik
	- Unintemuptible Power Supply (UPS)	14	Baik
	- Enconder/Decoder	2	Baik
	- Peralatan studio Visual Lain-lain	25	Baik
	- Camera Electronic	5	Baik
	- Photo Tustel Polaroid	1	Baik
	- Loudspeaker	1	Baik
	- Telephone (PABX)	3	Baik
	- Pesawat Telephone	27	Baik
	- Telephone Mobile	2	Baik
	- Facsimile	5	Baik
	- Handphone	14	Baik
	- Alat Komunikasi Lain-lain	2	Baik
	- Unit Transceiver VHF Portable	5	Baik
	- Sepeda Statis	1	Baik
	- Alat Kesehatan Olah Raga Lain-Lain	3	Baik
	- Blender	1	Baik
	- Frezeer	1	Baik
	- Personal Komputer	8	

https://jdih.pemalangkab.go.id

g. Bagian Organisasi

Tabel 2.10

SARANA DAN PRASARANA BAGIAN ORGANISASI
TAHUN 2024

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	Kondisi
1	Bagian Organisasi		
	- Station Wagon	1	Baik
	- Sepeda Motor	6	Baik
	Mesin Pelubang (Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi)	1	Baik
	Mesin Ketik Manual	1	Baik
	Lemari Besi/Metal	5	Baik
	Lemari Kayu	1	Baik
	Rak Besi	7	Baik
	Filing Cabinet Besi	1	Baik
	Brandkas	1	Baik
	Lemari Kaca	8	Baik
	Papan Visual/Papan Nama	2	Baik
	White Board	1	Baik
	Alat Penghancur Kertas	2	Baik
	Alat Kantor Lainnya	1	Baik
	Meja Kerja Kayu	1	Baik
	Kursi Besi/Metal	1	Baik
	Kursi Kayu	14	Baik
	Meja Rapat	1	Baik
	Meja Telepon	1	Baik
	Kursi Rapat	1	Baik
	Kursi Putar	4	Baik
	Meja Komputer	1	Baik
	Meubeleur lainnya	2	Baik
	A.C. Sentral	2	Baik
	A.C. Window	2	Baik
	Kipas Angin	1	Baik
	Televisi	6	Baik
	Wireless	1	Baik
	Camera film	3	Baik
	Kaca Hias	1	Baik
	Handy Cam	1	Baik
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV		Baik
	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III		Baik
	Uninterruptible Power Supply		Baik
	Camera Electronic		Baik
	Layar Film/Projector		Baik
	alat komunikasi telephone lainnya (dst)		Baik
	Mainframe (Komputer Jaringan)		Baik
	Lap Top		Baik
	Personal Komputer lainnya		Baik
	CPU (Peralatan Mainframe)		Baik
	Hard Disk		Baik
	CPU (Peralatan Personal Komputer)		Baik
	Printer (Peralatan Personal Komputer)		Baik
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)		Baik
	Peralatan Personal Komputer lainnya		Baik
	Server		Baik
	Hub		Baik

https://jdih.pemalangkab.go.id

h. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Tabel 2.11

SARANA DAN PRASARANA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
TAHUN 2024

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	Kondisi
1	Bagian PBJ		
	- Station Wagon	1	Baik
	- Sepeda Motor	7	Baik
	- Rak Besi	2	Baik
	- Filling Cabinet besi	2	Baik
	- CCTV	1	Baik
	- papan visual/papan nama	1	Baik
	- Alat penghancur kertas 1	1	Baik
	- mesin antrian	1	Baik
	- Meja Kerja Kayu	1	Baik
	- Kursi Besi/Metal	1	Baik
	- Meja rapat	1	Baik
	- Meja resepsionis	1	Baik
	- Kursi rapat	1	Baik
	- Kursi Tamu	1	Baik
	- Kursi Lipat	2	Baik
	- Sofa	1	Baik
	- AC Window	1	Baik
	- AC Split	2	Baik
	- Kipas Angin	1	Baik
	- Televisi	4	Baik
	- Camera Video	2	Baik
	- Tustel	1	Baik
	- Dispenser	1	Baik
	- Bracket Standing Peralatan	1	Baik
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	5	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	5	Baik
	- Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	1	
	- Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	1	Baik
	- Film Projector	1	Baik
	- Telephone mobile	2	Baik
	- PC unit	4	Baik
	- Laptop	7	Baik
	- Notebook	3	Baik
	- Personal Komputer Lainnya	1	Baik
	- Hardisk	1	Baik
	- Printer	6	Baik
	- Scanner	1	Baik
	- External/Portabel hardisk	2	Baik
	- Server	3	Baik
	- Router	1	Baik

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	Kondisi
	- Wireles Access Point	1	Baik
	- Peralatan jaringan Lainnya	1	Baik

i. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Tabel 2.12

SARANA DAN PRASARANA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN TAHUN 2024

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	Kondisi
	- Station Wagon	1	Baik
	- Sepeda Motor	7	
	- Scooter	1	Baik
	- Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	1	Baik
	- Lemari Besi	1	Baik
	- Rak Besi/Metal	1	Baik
	- Filling Besi/Metal	6	Baik
	- Lemari Kaca	2	Baik
	- Lemari kayu	4	Baik
	- Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1	Baik
	- Meja Kayu/Rotan	1	Baik
	- Zice	1	Baik
	- Meja Reseption	1	Baik
	- Kursi Putar	1	Baik
	- Meja Biro	3	Baik
	- Sofa	2	Baik
	- Lemari Es	1	Baik
	- AC Unit	8	Baik
	- AC Split	2	Baik
	- Kipas Angin	1	Baik
	- Televisi	2	Baik
	- Loudspeaker	1	Baik
	- Sound System	1	Baik
	- Microphone	2	Baik
	- Step Up/Down	1	Baik
	- Camera Video	3	Baik
	- Camera Film	1	Baik
	- Tustel	5	Baik
	- Dispenser	2	Baik
	- Handy Cam	1	Baik

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	Kondisi
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	4	Baik
	- P.C Unit	9	Baik
	- Lap Top	3	Baik
	- Note Book	2	Baik
	- Hard Disk	6	Baik
	- Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	2	Baik
	- Printer	3	Baik
	- Scanner	1	Baik
	- Monitor	2	Baik
	- Printer	9	Baik
	- Camera + Attachment	11	Baik
	- Audio Amplifier	1	Baik
	- Compact Disc. Player	2	Baik
	- Disc. Record Player	5	Baik
	- Headphone	2	Baik
	- Microphone/Wireless Mic	2	Baik
	- Battery Charger	3	Baik
	- Enconder/Decoder	1	Baik
	- Audio Cassete Recorder	2	Baik
	- Digital Audio Tape Recorder	1	Baik
	- Peralatan studio Visual Lain-lain	1	Baik
	- Camera Electronic	2	Baik
	- Video Switcher	1	Baik
	- Tripod Camera	4	Baik
	- Lighting Stand Tripod	1	Baik
	- Film Projector	2	Baik
	- Camera Film	3	Baik
	- Lensa Kamera	2	Baik
	- Mixer PVC	1	Baik
	- Layar Film	1	Baik
	- Lighting Head Body	4	Baik
	- Camera Vertikal	1	Baik
	- Megaphone	2	Baik
	- Handy Talky	4	Baik
	- Handphone	7	Baik
	- Unit Transceiver Stationary	2	Baik
	- Alat komunikasi Radio HF/FM Lain-lain	1	Baik
	- Unit Transceiver UHF Portable	1	Baik
	- Unit Pemancar VHF/FM Stationary	1	Baik

Berdasarkan data sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat Daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan untuk mendukung pelayanan publik. Namun demikian, seiring dengan

https://jdih.pemalangkab.go.id

penambahan jumlah pegawai dan jumlah layanan yang diberikan, kindisi tersebut masih belum optimal. Sehingga pada masa mendatang masih memerlukan penambahan maupun perbaikan sarana dan prasarana yang dimikiki untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.3. KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

2.3.1. Kinerja Fisik

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang selama tahun 2021-2024 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang menurut indikator kinerja pelayanan.

Adapun capaian kinerja yang telah dicapai pada periode Tahun 2021-2024 sebagaimana tabel 2.13. dibawah ini:

Tabel 2.13

REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2021 – 2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan dan Kesra yang terlaksana.	√			NA	91,93	92,27	93,13		94,69	95	104,66		**103,00%**	**102,96%**	**112,38%**
	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana.	√			NA	65,81	68,4	69,13		68,94	77,22	76,98		**104,76%**	**112,89%**	**111,36%**

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Umum yang terlaksana.	√			NA	57,87	58,37	58,77		59,85	60,31	60,29		103,42%	103,32%	102,59%
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif		√		9.90	10,3	10,4	10,6		38,69	74,08	50,96		375,63%	712,31%	480,75%
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan		√		56.34	56,9	57	57,1		10,15	11,27	55,5		17,84%	19,77%	97,20%
	Dokumen perencanaan Setda (RKA, RKAP, DPA, DPPA).					6				**6**				100%		
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.						3	3			3	3			100%	100%
	Jumlah bulan terlaksana nya fasilitasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja bagi ASN.					12				12				100%		
2	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN.						174	150			163	132			94%	88%
	Jumlah bulan terlaksananya fasilitasi penatausahaan					12				12				100%		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	keuangan perangkat daerah.															
3	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.						12	12			12	12			100%	100%
	Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun setda yang tersedia.					5				5				100%		
4	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.						1	1			1	1			100%	100%
	Jumlah Buku laporan semesteran yang tersedia.					5				5				100%		
5	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan.						1	1			1	1			100%	100%
	Jumlah Buku RKBMD yang tercetak.					20				20				100%		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
6	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.						2	2			2	2			100%	100%
	Jumlah pakaian dinas yang tersedia.					200				200				100%		
7	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan.						4	4			4	4			100%	100%
	Jumlah Pegawai yang terfasilisitasi urusan kepegawaiannya.					50				50				100%		
8	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.						2	2			2	2			100%	100%
	Jumlah Peserta yang mengikuti workshop guna peningkatan kompetensi pegawai.					30				30				100%		
	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi guna peningkatan kompetensi pegawai.					50				50				100%		
9	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.						75	112			300	112			400%	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	Jumlah pegawai yang mengikuti Bintek.					15				15				100%		
10	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.						13	13			13	13			100%	100%
	Jumlah bulan tersedianya peralatan untuk penerangan bangunan kantor.					12				12				100%		
11	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan.						4	4			4	4			100%	100%
	Jumlah bulan tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor.					12				12				100%		
12	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan.						12	12			12	12			100%	100%
	Jumlah bulan fasilitasi penyediaan peralatan Rumah Tangga.					12				12				100%		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
13	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan.						12	12			12	12			100%	100%
	Jumlah bulan terfasilitasi nya penyediaan bahan logistik kantor.					12				12				100%		
14	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan.						12	12			12	12			100%	100%
	Jenis Barang Cetakan yang tersedia.					8				8				100%		
15	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan.						12	12			12	12			100%	100%
	Jumlah Bahan bacaan yang tersedia.					1500				1500			#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!
16	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan.						9	9			12	12			133%	133%
	Jumlah bulan terlaksananya pelayanan Fasilitasi kegiatan kunjungan tamu.					12				12				100%		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
17	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu.						12	12			12	12			100%	100%
	Jumlah bulan terfasitasinya pelaksanaan Rakor dan Konsultasi didalam dan luar daerah					12				12				100%		
18	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.						12	12			12	12			100%	100%
	Jumlah Kendaraan dinas yang diadakan					11				11				100%		
19	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan.						0	1			0	1			#DIV/0!	100%
	Jumlah barang Mebeler yang diadakan.					19				19				100%		
20	Jumlah Paket Mebel yang disediakan.						200	24			200	24			100%	100%
	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan					24				24				100%		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
21	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan.						50	25			50	25			100%	100%
	Jumlah bulan terfasilitasi nya penatausahaan persuratan dinas.					12				12				100%		
22	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.						12	12			12	12			100%	100%
	Jumlah bulan tersedianya fasilitasi pemenuhan kebutuhan jasa listrik, telepon, air, internet					12				12				100%		
23	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan.						12	12			12	12			100%	100%
	Jumlah bulan jasa peralatan kantor yang tersedia.					12				12				100%		
24	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan.						12	12			12	12			100%	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	Jumlah bulan terfasilitasi nya pemenuhan kebutuhan jasa kantor					12				12				100%		
25	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12	12			12	12			100%	100%
	Jumlah Kendaraan Dinas atau jabatan yang terfasilitasi pemeiharaanya dan perijinannya					6				6				100%		
26	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.						6	6			6	6			100%	100%
	Jumlah Kendaraan dinas yang terfasilitasi peliharaan dan perijinannya					165				165				100%		
27	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan						150	153			150	153			100%	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	dibayarkan pajak dan perizinannya.															
	Jumlah Mebeler yang dipelihara					40				40				100%		
28	Jumlah Mebel yang dipelihara.						50	83			50	83			100%	100%
	Jumlah luasan Gedung kantor yang terpelihara					136				136				100%		
29	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi.						10	2			10	2			100%	100%
	Jumlah bulan terfasilitasinya pemenuhan kebutuhan pemeliharaan Perlengkapan kantor					12				12				100%		
30	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi.						175	222			175	222			100%	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	Jumlah bulan terfasilitasi nya penyediaan Gaji dan tunjangan KDH dan WKDH					12				12				100%		
31	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan.						2	2			1	1			50%	50%
	jumlah bulan terfasilitasi nya penyediaan pakaian dinas KDH/WKDH					300				250				83%		
32	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan.						12	12			12	12			100%	100%
	Jumlah bulan tersedianya Fasilitasi Perawatan Kesehatan KDH /WKDH					12				12				100%		
33	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala						2	2			2	2			100%	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	Daerah dan Wakil Kepala Daerah.															
	Jumlah bulan tersedianya fasiltasi pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah					12				12				100%		
34	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan.						12	12			12	12			100%	100%
	Jumlah bulan terlaksananya Fasiltasi pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah					12				12				100%		
35	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan.						12	12			0	0			0%	0%
	Jumlah bulan tersedianya Fasilitasi pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah					12				12				100%		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
36	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan.						12	12			12	12			100%	100%
	Jumlah Dokumen Anjab dan Evajab yang tersusun.					2				2				100%		
	Jumlah Dokumen Kelembagaan yang tersusun					2				2				100%		
37	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan.						2	2			2	2			100%	100%
	Kompetisi Inovasi pelayanan publik tahun 2021 yang terlaksana.					1				1				100%		
	Jumlah dokumen hasil SKM yang tersusun					2				2				100%		
	Jumlah KTP PNS yang dicetak.					1500				1500				100%		
	Dokumen Laporan Pembinaan Pelayanan Publik yang tersusun.					1				1				100%		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	Jumlah Dokumen Perbup tentang ketatalaksanaan yang tersusun.					1				1				100%		
38	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana.						2	2			2	2			100%	100%
	Jumlah OPD yang mendapat kan pendampingan pelaksanaan SAKIP.					41				41				100%		
	Jumlah dokumen capaian kinerja triwlan OPD yang tersusun tepat waktu.					32				32				100%		
	Jumlah OPD yang mendapat kan pendampingan pelaksanan RB.					41				41				100%		
	Jumlah dokumen capaian RB triwlanan OPD yang tersusun tepat waktu.					32				32				100%		
39	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.						2	2			2	2			100%	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi pelayanan TNDE yang tersusun.					1				1				100%		
	Jumlah Dokumen evaluasi SOP yang tersusun.					1				1				100%		
	Jumlah Dokumen proses bisnis yang tersusun.					1				1				100%		
40	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana						2	2			2	2			100%	100%
	Jumlah dokumen LKjIP Kabupaten yang tersusun tepat waktu.					1				1				100%		
	Jumlah dokumen laporan capaian RB Kabupaten yang tersusun tepat waktu.					1				1				100%		
41	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.						1	1			1	1			100%	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang terfasilitasi					350				784				224%		
42	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan.						12	12			12	12			100%	100%
	Jumlah buku katalog sambutan pimpinan yang tersusun.					40				40				100%		
	Jumlah materi sambutan pimpinan yang tersusun.					350				701				200%		
43	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan.						12	12			12	12			100%	100%
	Jumlah kegiatan KDH/ WKDH yang terdokumentasi.					350				784				224%		
	Jumlah Katalog Notulensi Rapat KDH					41				41				100%		
44	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan.						12	12			12	12			100%	100%
	Jumlah Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah.					4				5				125%		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Pemalang.					1				0				0%		
	Jumlah Kecamatan yang dimonitoring dan dievaluasi dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).					14				14				100%		
	Jumlah Kelurahan yang diberikan pembinaan dan pengawasan penggunaan dana alokasi kelurahan.					11				11				100%		
	Jumlah Data Monografi Semesteran yang tersusun.					2				2				100%		
45	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan.						2	2			2	2			100%	100%
	Jumlah Nama Rupabumi yang dibakukan.					2				2				100%		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	Jumlah Pilar Batas Daerah yang terpelihara.					5				8				160%		
46	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan.						2	2			2	2			100%	100%
	Jumlah dokumen evaluasi SPM yang tersusun.					1				1				100%		
	Jumlah LPPD yang tersusun.					1				1				100%		
	Jumlah dokumen LKPJ yang tersusun.					1				1				100%		
47	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.						3	4			3	4			100%	100%
	Jumlah Fasilitasi Pelaksana an Kegiatan Keagamaan.					5				7				140%		
	Jumlah terlaksananya pembinaan keagamaan terhadap ASN.					12				12				100%		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	Jumlah terlaksananya pembinaan lembaga keagamaan.					6				6				100%		
	Jumlah terlaksananya fasilitasi rakor dan monev keagamaan					4				4				100%		
	Jumlah fasilitasi pemberian bantuan sosial/hibah keagamaan.					2				2				100%		
48	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual.						4	4			4	4			100%	100%
	Terlaksananya rakor dan monev pelaksanaan kebijakan sosial dan sosialisasi/pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan					5				5				100%		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
49	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB.						2	2			2	2			100%	100%
	Terlaksananya rakor dan monev penanggulangan kemiskinan					4				4				100%		
50	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan						1	1			1	1			100%	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas.															
	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disinkronisasi dan diharmonisasi.					760				564				74%		
	Jumlah Propemperda yang disusun dalam 1 Tahun (Surat Bupati tentang Propemperda Tahun 2023.					1				1				100%		
	Jumlah Raperda menjadi Perda dalam 1 Tahun .					12				13				108%		
	Jumlah Sosialisasi Rancangan Produk Hukum Daerah.					2				2				100%		
	Jumlah Pra Raperda menjadi Raperda di Eksekutif.					12				9				75%		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi pelayanan E Corr yang tersusun.					1				1				100%		
51	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun.						550	550			565	766			103%	139%
	Jumlah Desa Sadar Hukum yang diusulkan.					14				0				0%		
	Jumlah Kelompok Kadarkum yang dibentuk/ dibina.					6				6				100%		
	Jumlah Kelompok Peserta Lomba Kadarkum.					14				14				100%		
	Jumlah laporan data peduli HAM yang disusun.					1				1				100%		
	Jumlah laporan pelaksanaan aksi HAM yang disusun.					3				3				100%		
	Jumlah legal opinion dalam satu tahun.					2				0				0%		
	Jumlah pengaduan masyara kat yang tertangani.					12				16				133%		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi aksi HAM dan Kabupaten/Kota peduli HAM.					35				35				100%		
	Jumlah Unit Bantuan Hukum yang dibentuk untuk menyerselesaikan perkara.					3				1				33%		
	Jumlah Unit Bantuan Hukum yang dibentuk untuk menyelesaikan perkara bagi masyarakat miskin.					6				0				0%		
	Jumlah kegiatan penyuluhan peraturan perundang-undangan di desa dalam 1 tahun.					4				4				100%		
52	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum.						2	2			7	3			350%	150%
	Jumlah Buku Referensi yang dibeli.					40				40				100%		
	Jumlah buku produk hukum daerah yang dicetak.					4250				4250				100%		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	Jumlah kegiatan sosialisasi Produk Hukum Daerah dalam 1 tahun.					14				14				100%		
	Jumlah Produk Hukum Daerah yang dikaji.					5				5				100%		
	Jumlah produk hukum yang dipublikasikan.					20				20				100%		
	Rakor JDIH Tingkat Kabupaten.					2				2				100%		
	Sosialisasi JDIH untuk Desa.					1				1				100%		
	Jumlah Bintek JDIH untuk 14 desa percontohan.					1				1				100%		
	Jumlah produk hukum desa yang diklarifikasi.					100				61				61%		
	Pembinaan produk hukum desa.					14				14				100%		
53	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi.						550	550			644	766			117%	139%

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	Jumlah Naskah Kerja Sama Daerah/ Sinergi yang tersusun.					10				10				100%		
	Jumlah Data Penggalian/ Pemetaan Kerja Sama Daerah.					1				1				100%		
	Jumlah Koordinasi Kerja Sama Wajib yang dilaksanakan.					2				2				100%		
54	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri.						10	10			13	12			130%	120%
	Jumlah MoU yang tersusun					1				0				0%		
55	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri.						1	1			1	1			100%	100%
	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Daerah/ Sinergi					2				2				100%		
56	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.						2	2			2	2			100%	100%
	Jumlah koordinasi pemantauan terhadap kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD					14				14				100%		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
57	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD.						3	3			4	3			133%	100%
	Jumlah kormonevlap DBHCHT yang terselenggara.					4				4				100%		
	Jumlah Rakor Ekuinda dan kormonevlap Ekuinda yang terselenggara.					6				6				100%		
	Jumlah Rakor TPID dan kormonevlap TPID yang terselenggara.					6				6				100%		
58	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian.						4	4			4	4			100%	100%
	Jumlah kormonevlap perkoperasian dan UMKM yang terselenggara					6				6				100%		
59	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan						1	1			1	1			100%	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.															
	Jumlah dokumen penetapan kinerja dan evaluasi kinerja yang tersusun.					4				4				100%		
	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun.					2				2				100%		
60	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah.						6	6			6	6			100%	100%
	Jumlah dokumen standar harga yang tersusun.					3				3				100%		
	Jumlah dokumen ASB yang tersusun.					1				1				100%		
61	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan.						4	4			4	5			100%	125%
	Jumlah laporan pengendali an pembangunan yang tersusun.					4				4				100%		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	Jumlah pekerjaan fisik yang dimonitor.					75				114				152%		
62	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.						4	4			5	4			125%	100%
	Fasilitasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui tender/seleksi.					50				53				106%		
63	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.						55	55			65	62			118%	113%
	Jumlah Desk Rencana Umum Pengadaan.					2				2				100%		
	Jumlah Penayangan paket pengadaan barang dan jasa lewat LPSE.					200				820				410%		
	Penyediaan layanan Internet Service Provider (ISP) untuk LPSE.					12				12				100%		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	Sewa colocation backup server LPSE.					1				1				100%		
64	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik.						4	4			4	4			100%	100%
	Penilaian angka kredit untuk pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa.					5				5				100%		
	Peningkatan kualitas teknis sekretariat dan pokja UKPBJ.					20				20				100%		
	Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Desa di setiap Kecamatan.					14				14				100%		
	Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di OPD Kab. Pemalang.					41				41				100%		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
65	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa untuk penilaian angka kredit.						20	20			20	20			100%	100%
	Jumlah kormonevlap KP3 dan PPTR yang terselenggara.					12				12				100%		
	Jumlah Asistensi kegiatan DBHCHT.					3				3				100%		
	Jumlah Monev DBHCHT.					40				40				100%		
	Jumlah Rakor DBHCHT.					25				25				100%		
66	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja.						2	2			2	2			100%	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	Jumlah koordinasi, monev, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pertambangan dan LH yang terselenggara.					12				12				100%		
67	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian.						1	1			1	1			100%	100%
	Jumlah koordinasi, monev, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan air.					12				12				100%		
68	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat						2	2			2	2			100%	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	dan Kawasan Permukiman, Pertanahan.															

https://jdih.pemalangkab.go.id

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat Kinerja IKU Sekretariat Daerah secara umum melebihi target yang telah ditetapkan, baik secara target periodik tahunan maupun target akhir perode Renstra 2021-2026. Capaian sasaran strategis 1 " Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan Dan Kesra" pada Tahun 2024 sebesar 104,66 atau 110,63 % dari target akhir Renstra sebesar 94,40. Capaian ini didukung oleh pencapaian kinerja pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan sinergi daerah yang sangat baik, penyusunan produk hukum daerah yang dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuan dengan kebutuhan, harmonisasi produk hukum daerah dengan peraturan lain yang senantiasa terjaga dengan baik, fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan, serta kepuasan publik atas layanan yang diberikan.

Capaian sasaran strategis 2 " Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan" pada tahun 2024 tercapai kinerja sebesar 76,98 sementara target akhir Renstra adalah 72,13. Hal ini terdapat realisasi melebihi target sebesar 106,72. Kinerja ini didukung oleh perbaikan tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik, kinerja pengawasan pelaksanaan pembangunan yang dilihat dari kondisi serapan anggaran yang semaikin baik, kontribusi pertumbuhan setoran deviden ke Kas daerah yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Capaian sasaran strategis 3 " Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Administrasi Umum" kinerja pada tahun 2024 sebesar 60,29 dari atau 101,17 % dari target akhir Renstra yaitu 59,59. Pencapaian kinerja ini didukung oleh peningkatan kualitas Reformasi Birkrasi yang semaikin baik, kualitas pelayanan publik yang semakin baik, layanan keprotokolan dan dokumentasi yang baik dan memuaskan pengguna layanan, serta kepuasan pelanggan atas layanan umum yang diberikan.

Sementara itu kinerja IKK, dimana Sekretariat Daerah melaksanakan dua indikator yaitu Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif dan Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan. Capaian Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif pada tahun 2024 sebesar 50,96 atau 467 % dari target akhir Renstra sebesar 10,9. Realisasi yang sangat tinggi disebabkan adanya perbedaan metodologi penghitungan sewaktu penyusunan target dan penghitungan kinerja, dimana ketita penghitungan kinerja diperoleh melalui perhitungan belanja yang dilakukan melalui tender dan penunjukan langsung sementara penghitungan target hanya memperhitungkan belanja melalui tender saja. Namun demikian kinerja ini dikategorikan baik, dan menunjukkan adanya perbaikan kualitas Pengadaan Barang dan Jasa dimana 50% lebih belanja pemerintah sudah menerapkan metode kompetitif dan mengurangi praktik swakelola. Diharapkan dengan adanya pencapaian kinerja ini belanja pemerintah semakin efektif dan bisa mendukung pertumbuhan perekonomian daerah.

Untuk indikator IKK yang kedua yaitu Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan, kinerja pada Tahun 2024 sebesar 55,5 atau 96,5 % dari target akhir Renstra sebesar 57,5. Kinerja indikator ini dikategorikan sangat baik dimana 55,5 % belanja selain belanja pegawai sudah dilakukan melalui pengadaan barang baik

https://jdih.pemalangkab.go.id

tender maupun non tender. Kedepan akan terus diupayakan agar semakin besar nilai belanja yang dilakukan melalui metode pengadaan yang efektif dan tepat.

Terkait dengan Program Pengarusutamaan Gender, Sekretariat Daerah tidak memiliki anggaran yang secara spesifik yang yang mendanai program tersebut. Namun demikian, seluruh Program dan Kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang telah mendukung pogram tersebut meskipun tidak secara langsung.

2.3.2. Kinerja Anggaran

Selanjutnya berkaitan dengan kinerja keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang, total anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang periode 2021-2025 sebesar Rp. 284.017.100.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi Rp.274.594.694.000,- dan Belanja Modal Rp.9.422.406.000,- Dari Belanja tersebut terealisasi sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp. 206.091.283.000,- (91,73%) yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. 199.631.172.000,- (93,30%) dan Belanja Modal sebesar Rp. 6.460.611.000,- (90,53%). Secara lengkap anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel 2.14. di bawah ini :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.14

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2021 – 2025
dalam ribuan (Rp)

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggar			
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
Belanja	47.713.478	67.160.820	59.413.929	51.884.523	57.844.350	42.679.118	60.800.705	55.285.280	47.326.180	0	89%	91%	93%	91%
Belanja Operasi	45.302.343	64.419.701	58.850.215	50.957.489	55.064.946	40.366.613	58.130.929	54.729.894	46.403.736		89%	90%	93%	91%
Belanja Modal	2.411.135	2.741.119	563.714	927.034	2.779.404	2.312.505	2.669.776	555.386	922.444		96%	97%	99%	100%
Program Kesejahteraan Rakyat	2.849.847.400	18.652.559.773	22.029.076.866	15.944.376.006	20,070,911,910	2.774.644.014	16.121.262.505	19.653.689.409	13.545.619.655		97.36	86.43%	89.22%	84,96%
Program Perekonomian dan Pembangunan	4.898.640.100	3.199.309.874	3.240.205.243	2.275.253.366	1,454,459,200	1.728.886.579	2.871.756.596	3.174.864.602	2.216.050.998		35.29%	89.76%	97.98%	97,40%
Program Penunjang Pemerintahan Daerah	39.964.990.900	45.308.951.353	34.144.648.141	33.664.893.899	36,318,979,478	38.175.588.845	41.007.687.137	32.468.120.033	31.665.649.755		95.52%	90.51%	95,09%	94,06

https://jdih.pemalangkab.go.id

Mendasarkan pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang 2021-2024 yang masuk dalam kategori sangat baik, maka sebagai upaya optimalisasi kinerja pada periode 2025-2029 Sekretariat Daerah berupaya meningkatkan kinerja lebih baik dengan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi. Hal yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah adalah melalui mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Tata kelola pemeritahan yang efektif dan efisien akan dicapai melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas efisiensi dan efektivitas implementasi kebijakan daerah. Hal tersebut dapat mendorong kegiatan pemerintah dapat fokus pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan pemerintah daerah sangat beragam sehingga untuk lebih meningkatkan fokus kerja evaluasi, maka pemantauan akan dibagi ke dalam evaluasi efektifitas kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, evaluasi efektifitas kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan, dan evaluasi efektifitas kebijakan di bidang Administrasi Umum. Diharapkan melalui evaluasi efektifitas dan efisiensi implementasi kebijakan maka pencapaian program.

2.4. KELOMPOK SASARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Mendasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024, kelompok sasaran dari layanan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Pemalang, hal ini terkait layanan koordinatf, evaluasi pelaksanaan tugas, penyusunan dan evaluasi kebijakan daerah.
2. Masyarakat Kabupaten Pemalang, yang mendapatkan layanan berupa pemberian Hibah/Bansos Keagamaan, fasilitasi pelaksanaan hari besar keagamaan, fasilitasi persuratan, fasilitasi keikutsertaan dalam pengadaaan barang dan jasa pemerintah.

2.5. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Sekretariat Daerah tidak bisa terlepas dari hubungan dengan berbagai pihak, baik itu internal seluruh perangkat daerah di Kabupaten Pemalang, Pemerintah Provinsi, dan juga Pemerintah Pusat. Akibat dari hubungan tersebut maka terdapat faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Sekretariat Daerah. Adanya faktor-faktor tersebut dapat menjadi ancaman maupun peluang dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

Berikut ini adalah identifikasai permasalahan pokok, permasalahan, dan akar permasalahan atas penyelenggaraan layanan Sekretarat Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diberikan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

TABEL 2.15

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	• Perlunya peningkatan kompetensi SDM penyusun produk hukum daerah • Belum optimalnya fasilitasi penyusunan dan dokumentasi produk hukum daerah serta pemberian fasilitas bantuan hukum bagi masyarakat miskin. • Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pemalang • Belum optimalnya layanan pemerintah di tingkat kecamatan • Belum optimalnya pelaksanaan kerja sama daerah dan sinergi • Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat
Belum optimalnya kualitas kebijakan daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan	Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perekonoian dan Pembangunan	• Belum optimalnya Proses PBJ • Belum optimalnya efisiensi dan efektifitas kinerja BUMD • Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan perekonomian daerah dalam pengendalian inflasi dan distribusi barang pokok • Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas kebijakan daerah di bidang Administrasi Umum	Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Administrasi Umum	• Belum optimalnya pelayanan publik di Kabupaten Pemalang • Masih rendahnya kematangan kelembagaan perangkat daerah • Belum optimalnya pelaporan akuntabilitas daerah

Apabila dilihat dari sudut pandang aspek layanan, alur permasalahan yang muncul akan disajikan sebagaimana tabel berikut.

TABEL 2.16

PEMETAAN ANALISI LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

Aspek	Capaian Saat ini	Faktor yang Memengaruhi		Permasalahan Perangkat Daerah
		Internal	Eksternal	
Pelayanan pengadaan barang/ jasa	Belum optimalnya hasil peniilaian ITKP	Kompetensi SDM PBJ	Kompetensi SDM PBJ	Belum optimalnya Proses PBJ
Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD, SPM)	Penyampaian data laporan oleh Perangkat Daerah belum dilaksanakan tepat waktu	Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi pelaporan	Penyampaian data tidak lengkap	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pemalang
Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat	Pelayanan PATEN belum berjalan optimal	Kompetensi SDM belum optimal	Peangkat Daerah belum sepenuhnya melakukan pelimpahan kewenangan kepada Camat	Belum optimalnya layanan pemerintah di tingkat kecamatan
Fasilitasi kerja sama dan sinergi daerah	Pelaksanaan fasilitasi kerjasama bukan berasal dari hasil perencanaan namun hanya	Kuantitas dan kompetensi SDM belum optimal	Kompetensi SDM terkait identifikasi kebutuhan kerja sama daerah belum optimal	Belum optimalnya pelaksanaan kerja sama daerah dan sinergi

https://jdih.pemalangkab.go.id

Aspek	Capaian Saat ini	Faktor yang Memengaruhi		Permasalahan Perangkat Daerah
		Internal	Eksternal	
	sekedar memenuhi kebutuhan			
Pelayanan Publik	Masih terdapat aduan atas layanan publik di Kabupaten Pemalang	Keterbatasan SDM Kompetensi SDM	Kompetensi SDM pelaksana layanan publik belum optimal. SOP dan SPP belum tersusun dengan baik. Masih rendahnya keterlibatan pengguna layanan dalam penyusunan maupun evaluasi standar layanan.	Belum optimalnya pelayanan publik di Kabupaten Pemalang
Kelembagaan		Keterbatasan SDM Kompetensi SDM		Masih rendahnya kematangan kelembagaan perangkat daerah
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Skor penilaian SAKIP komponen pelaporan belum optimal	Aplikasi pelaporan perlu dilakukan updating	Kompetensi SDM Pemanfaatan apikasi pelaporan masih rendah Kualitas pelaporan belum optimal Keandalan data pelaporan masih perlu ditingkatkan Informasi kinerja belum dimanfaatkan secara optimal	Belum optimalnya pelaporan akuntabilitas daerah
Pengelolaan BUMD dan BLUD	Pertumbuhan laba BUMD belum optimal	Kompetensi SDM	Regulasi yang memengaruhi kinerja BUMD.	Belum optimalnya efisiensi dan efektifitas kinerja BUMD

https://jdih.pemalangkab.go.id

Aspek	Capaian Saat ini	Faktor yang Memengaruhi		Permasalahan Perangkat Daerah
		Internal	Eksternal	
			Persaingan usaha dengan bidang usaha sejenis. Permodalan yang belum optimal.	
Penanggulangan inflasi daerah	Angka inflasi masih termasuk tinggi	Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral dalam penanggulangan inflasi dan dan distribusi barang pokok	Mekanisme harga ditentukan oleh pasar	Belum optimalnya kebijakan perekonomian daerah dalam pengendalian inflasi dan distribusi barang pokok
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan		Keterlambatan penyampaan laporan progess pekerjaan	Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah
Fasilitasi penyusunan dan dokumentasi produk hukum daerah	Belum optimalnya skor IRH	Belum optimalnya kompetensi SDM Keterbatasan SDM	Penyelesaian produk hukum terkait dengan pembahasan yang dilakukan oleh instansi lain. Belum tersedianya LBH yang menangani bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pemalang. Dinamika regulasi yang ssangat cepat.	Belum optimalnya fasilitasi penyusunan dan dokumentasi produk hukum daerah serta pemberian fasilitas bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
Fasilitasi peningkatan kesejahteraan masyarakat	Belum meratanya pemberian bantuan hibah/bansos keagamaan dan sosial.	Perlunya peningkatan kompetensi SDM dalam perumusan kebijakan Kesra. Keterbatasan jumlah SDM.	Keterlambatan penyampaian data permohonan bantuan. Keterlambatan penyampaian	Belum optimalnya kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Aspek	Capaian Saat ini	Faktor yang Memengaruhi		Permasalahan Perangkat Daerah
		Internal	Eksternal	
	Persentase penduduk miskin yang masih tinggi.		pertanggungjawaban bantuan.	
Layanan umum dan keprotokolan	Skor IKM atas layanan umum dan keprotokolan yang belum optimal	Keterbatasan jumlah SDM Standar layanan belum terkomunikasikan dengan baik kepada pengguna layanan. Banyaknya saranan dan prasarana penunjang layanan yang belum terpenuhi.		Belum optimalnya pelayanan umum pada Sekretariat Daerah
Akuntabiitas Internal	Nilai SAKIP belum mencapai 70	Kesadaran penyusunan laporan akuntabilitas belum terbangun secara optimal		Belum optimalnya pelaporan akuntablitas internal

2.6. IDENTIFIKASI ISU STRATEGIS

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah. Sedangkan fungsi Sekretariat Daerah adalah :

1. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pemahaman atas kekuatan dan kelemahan internal serta kemampuan membaca peluang dan mengidentifikasi ancaman dari luar, merupakan kunci sukses sebuah organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Hal tersebut bisa dituangkan dalam Analisis SWOT. Berikut ini hasil Analisis SWOT untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

- *Kekuatan (Strenghts),* yaitu situasi dan kondisi internal positif yang memungkinkan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang mengambil peran serta di dalam mewujudkan visi dan misi daerah. Komponen kekuatan yang dimiliki antara lain :
  a. Tugas pokok dan fungsi yang jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
  b. Adanya dukungan kebijakan anggaran dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;
  c. Adanya dukungan dan komitmen dari Pimpinan;
  d. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

- Kelemahan *(Weaknesses)* yaitu situasi dan kondisi internal negatif yang dapat menghambat langkah organisasi di dalam mewujudkan visi dan misi daerah. Komponen kelemahan yang ditengarai ada antara lain :
  a. Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsinya;
  b. Perlunya peningkatan kompetensi SDM Aparatur sesuai dengan bidang tugasnya;
  c. Kurangnya optimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah maupun instansi lainnya;
  d. Kurang optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana dalam penyelesaian tugas.

- *Peluang (Opporttunities)* yaitu situasi dan kondisi eksternal positif yang mempermudah Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang didalam mewujudkan visi dan misi daerah. Komponen peluang yang dapat dijumpai antara lain :

  a. Implementasi Sistem Merit, pemberian tunjangan kinerja, dan pemberian sanksi yang jelas serta tegas bagi aparatur diharapkan dapat memberikan motivasi dalam meningkatkan kinerja aparatur;
  b. Adanya kewajiban dan pemberian penghargaan bagi daerah maupun perangkat daerah yang berhasil melakukan inovasi pelayanan publik;
  c. Adanya kebijakan nasional yang dapat mendorong kinerja Pemerintah Daerah ;
  d. Stabilitas dan kondusivitas daerah.

- Ancaman *(Threats)* yaitu situasi dan kondisi eksternal yang bisa menghambat Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang didalam mewujudkan visi dan misi daerah. Komponen ancaman yang dapat dijumpai antara lain
  a. Kurangnya disiplin dan budaya kerja yang rendah;

https://jdih.pemalangkab.go.id

b. Perubahan iklim global yang cepat;
c. Mekanisme pasar terbuka yang memberikan dampak besar pada perkembangan perekonomian daerah;
d. Perkembangan dan penyebaran teknologi dan informasi yang sangat cepat pada tatanan masyarakat modern.

Dengan memperhatikan keterkaitan dengan Renstra Instansi Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, meskipun tidak terdapat keterkaitan secara langsung terkait sasaran yang hendak dicapai, namun demikian tusi yang diemban memiliki keterkaitan erat terhadap hal tersebut. Keterkaitan ini tidak lepas dari peran dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai koordinator pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pelayanan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Belum optimalnya pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dimana Perangkat Daerah belum memaksimalkan penggunaan e-katalog untuk pengadaan barang dan jasa, sehingga hal tersebut perlu terus didorong untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas pengadaan barang dan jasa. Selain itu, proses tata kelola PBJ juga memerlukan dukungan kompetensi SDM yang baik, sehingga perlu ditingkatkan keikutsertaannya dalam kegiatan pengembagnan kompetensi SDM PBJ.
b. Belum optimalnya pemanfaatan sinergi dan kerja sama untuk mendukung pembangunan daerah, yang pada dasarnya merupakan sebuah hal yang sangat krusial, namun masih ada. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman tugas pokok dan fungsi pada Perangkat Daerah, masih terdapat ego sektoral sehingga tidak mengutamakan kepentingan bersama dalam pencapaian tujuan organisasi. Diharapkan dengan peran koordinatif yang dijalankan bisa membantu pencapaian tujuan daerah melalui optimalisasi kerja sama dan sinergi.
c. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pemalang, yang salah satunya dapat dilihat belum optimanya proses pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat, dimana harapannya dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan pemerintahan.
d. Pelayanan publik yang belum optimal, terutama berkaitan dengan pemenuhan kualitas sarana dan prasarana layanan publik serta penyederhanaan prosedur.
e. Belum optimalnya pelaporan akuntabilitas pemerintah daerah yang berdampak Nilai SAKIP masih rendah.
f. Belum optimalnya kinerja BUMD, dimana belum seluruh BUMD berkontribusi terhadap setoran laba kepada PAD, sehingga

https://jdih.pemalangkab.go.id

kedepannya diharapkan terdapat kebijakan pengelolaan BUMD yang bisa berdampak pada peningkatan efisiensi dan efektifitas kinerja BUMD.

g. Belum optimalnya kebijakan perekonomian daerah yang salah satunya dilihat dari pengendalian inflasi daerah, dimana kebijakan yang ada belum sepenuhnya bisa mengendalikan laju inflasi yang disebabkan kuatnya pengaruh hukum pasar.
h. Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan pembangunan, hal ini menjadi sebuah permasalahan karena kurangnya SDM maupun kompetensi yang dimiliki oleh SDM yang ada. Namun demikian dengan tusi yang jelas, dan komitmen setra dukungan penuh dari pimpinan dalam pelaksanaan tugas diharapkan permasalahan ini dapat teratasi dan kualitas pembangunan daerah bisa meningkat dalam kaitannya mendukung perbaikan dan peningkatan kualitas layanan publik.
i. Perlunya peningkatan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah dengan peraturan perundangan lainnya serta pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dengan adanya keterbatasan SDM baik secara kuantitas maupun kompetensinya, cukup menjadi tantangan dalam peningkatan kualitas layanan dibidang hukum. Namun demikian, dengan adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas, komitmen pimpinan, pemberian tambahan penghasilan yang layak, dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, diharapkan bisa mengatasi permasalahan ini dan meningkatkan kualitas layanan dalam perlindungan pelaksanaan kegiatan sehari-hari melalui aspek peraturan perundangan yang terbarukan.
j. Belum optimalnya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara terintegrasi, menjadi tantangan lain dari layanan Sekeretariat Daerah. Dengan tusi utama sebagai koordinator implemantasi dan evaluasi kebijakan, diharapkan bisa menekan kelemahan lemahnya koordinasi antar Perangkat Daerah. Selain itu, dengan mendasarkan pada Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, dimana Sekretaris Daerah berperan sebagai Wakil Ketua TKPKD, serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat berperan sebagai Wakil Kepala Sekretariat TKPKD, Sekeretariat Daerah memiliki peran yang cukup strategis dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui koordinasi yang baik diharapkan bisa tercipta peningkatan kualitas

https://jdih.pemalangkab.go.id

layanan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terintegrasi.

k. Masih rendahnya kualitas layanan publik yang sesuai dengan prinsip *good governance*, menjadi sebuah tantangan besar untuk bisa menghadirkan pelayanan prima kepada masyarakat. Namun demikian hal tersebut cukup terganjal dengan budaya dan etos kerja pegawai yang masih rendah maupun adanya anggapan pekerjaan sebagai sebuah rutinitas sehingga tidak melahirkan inovasi dalam pelayanan publik. Tantangan ini diharapkan bisa diatasi dengan pemberian kesejahteraan pegawai yang memadai, peningkatan kompetensi untuk pemahaman tusi maupun bekal dalam pemberial pelayanan, maupun dukungan dari pencantuman tugas pokok dan fungsi yang cukup jelas dan mudah dipahami bagi pengampunya.
l. Indeks RB Setda yang masih rendah, tantangan ini masih sama dengan tantangan layanan sebelumnya yaitu terkait kualitas layanan publik, sehingga penyebab dan solusinya tidak jauh berbeda dengan hal tersebut.

Sementara itu peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan tusi dan meningkatkan kinerja antara lain sebagai berkut:

a. Pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai yang bisa memacu peningkatan kinerja aparatur;
   Pemberian tunjangan kinerja sebagai upaya peningkatan kesejahteraan pegawai, dan salah satu mekanisme pemberian penghargaan kinerja pegawai, diharapkan mampu meningkatkan semangan dan etos kerja pegawai yang pada akhirnya diharapkan bisa meningkatkan kinerja organisasi.
b. Adanya kewajiban dan pemberian penghargaan bagi perangkat daerah yang berhasil melakukan inovasi pelayanan publik;
   Dengan adanya kewajiban melaksanakan inovasi dalam pelayanan sebagaimana tusi yang diemban dan adanya kompetisi inovasi pelayanan publik, diharapkan bisa menjadi cambuk semangat pegawai untuk terus berkarya dan memberikan pelayanan yang terbaik.
c. Adanya keinginan kuat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
d. Stabilitas perekonomian daerah.
   Dengan adanya stabilitas perekonomian daerah, diharapkan tidak akan memengaruhi kualitas layanan dan kinerja perangkat daerah, karena tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap anggaran yang telah dialokasikan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal diatas, dengan menggunakan Analisis SWOT, maka sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

a. *Strategi Strenghts Opportunity*, yaitu mendayagunakan kekuatan, memanfaatkan peluang.
b. *Strategi Strenghts Threats,* yaitu mendayagunakan kekuatan, hindari ancaman.
c. *Strategi Weakness Opportunity*, yaitu mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang
d. *Strategi Weakness Threats,* yaitu meminimalkan kelemahan, menghindari ancaman.

ALI / ALE	**Kekuatan (strenghts/S)**	**Kelemahan (Weakness/W)**
	1) Tugas pokok dan fungsi yang jelas 2) Dukungan kebijakan anggaran 3) Adanya dukungan dan komitmen dari Pimpinan 4) Dukungan sarana dan prasarana yang memadai.	1) Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsinya 2) Kompetensi SDM masih rendah 3) Belum optimalnya koordinasi antar PD 4) Kurang optimalnya pemanfaatan sarana dan prasaran.
PELUANG (O)	**S+O**	**W+O**
1) Adanya Sistem Merit dalam pengelolaan SDM Aparatur 2) Kewajiban untuk berinovasi dalam pelayanan 3) Adanya kebijakan nasional yang mendukung kinerja daerah. 4) Stabilitas dan kondusivitas daerah.	1) Mendayagunakan SDM untuk meningkatkan kualitas layanan melalui penerapan sistem merit, inovasi layanan, dan pemberian pernghargaan (S1-O1,2) 2) Mengoptimalkan adanya dukungan dan komitmen pimpinan maupun anggaran serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima yang sejalan dengan kebijakan pusat maupun provinsi (S2,3,4-O2) 3) Melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang jelas serta adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparatur PNS (S1-O1,2).	1) Meningkatkan pemahaman tugas pokok dan fungsi serta mengintensifkan koordinasi antar PD untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (W1, 3-O3) 2) Mengoptimalkan kinerja SDM aparatur dan dukungan sarana dan prasarana yang ada untuk mewujudkan pelayanan prima (W2,3-O2). 3) Meningkatkan kompetensi SDM untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan (W2 – O3)
ANCAMAN (T)	**S+T**	**W+T**

https://jdih.pemalangkab.go.id

ALE \ ALI	Kekuatan (strenghts/S)	Kelemahan (Weakness/W)
1) Kurangnya displin dan budaya kerja yang profesional 2) Kurang tertibnya administrasi, transparansi dan akuntabilitas 3) Pelayanan dianggap sebagai rutinitas 4) Stabilitas ekonomi global yang kurang menentu.	1) Mengoptimalkan pelaksanaan tupoksi yang jelas untuk mengatasi kurang tertibnya administrasi, transparansi dan akuntabilitas 2) Mendayagunakan SDM aparatur dan adanya dukungan dan komitmen dari Pimpinan untuk mengatasi kurangnya disiplin dan budaya kerja yang rendah.	1) Meminimalkan kurangnya pemahaman tupoksi dan mengintensifkan koordinasi antar PD untuk dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah. 2) Meningkatkan kinerja SDM aparatur dan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana untuk menghindari pelayanan dianggap sebagai suatu rutinitas.

Bagan 2.2 Analisis SWOT

TABEL 2.17

Keterkaitan KLHS dengan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
MEMBANTU BUPATI DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PENGOORDINASIAN ADMINISTRATIF TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DAERAH SERTA PELAYANAN ADMINISTRATIF		Belum optimalnya budaya e-government dan upaya peningkatan pendapatan daerah				
	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pemalang	Belum optimalnya budaya e-government dan upaya peningkatan pendapatan daerah				Peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Belum optimalnya layanan pemerintah di tingkat kecamatan	Belum optimalnya budaya e-government dan upaya peningkatan pendapatan daerah				
	Belum optimalnya pelaksanaan kerja sama daerah dan sinergi	Belum optimalnya budaya e-government dan upaya peningkatan pendapatan daerah				
	Belum optimalnya fasilitasi penyusunan dan dokumentasi	Belum optimalnya budaya e-		Dinamika perubahan regulasi		

https://jdih.pemalangkab.go.id

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
	produk hukum daerah serta pemberian fasilitas bantuan hukum bagi masyarakat miskin.	government dan upaya peningkatan pendapatan daerah				
	Belum optimalnya kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat.	Belum optimalnya distribusi kesejahteraan dengan dukungan kepastian hukum yang adil dan berbasis gender		Regulasi terkait pengentasan kemiskinan	Regulasi terkait pengentasan kemiskinan	
	Belum optimalnya efisiensi dan efektifitas kinerja BUMD	Belum optimalnya budaya e-government dan upaya peningkatan pendapatan daerah		Dinamika Regulasi terkait usaha BUMD		Peningkatan efisiensi dan efektivitas implementasi kebijakan di Bidang Perekonomian dan pembangunan
	Belum optimalnya kebijakan perekonomian daerah dalam pengendalian inflasi dan distribusi barang pokok	Belum optimalnya budaya e-government dan upaya peningkatan pendapatan daerah	Stabilitas perekonomian global	Stabilitas perekonomian nasional	Stabilitas perekonomian regoinal	
	Belum optimalnya Proses PBJ	Belum optimalnya budaya e-government dan upaya peningkatan pendapatan daerah		Penggunaan e-katalog untuk kemudahan proses PBJ		
	Belum optimalnya pelayanan publik di Kabupaten Pemalang	Belum optimalnya budaya e-government dan upaya peningkatan pendapatan daerah				Peningkatan efisiensi dan efektifitas impleentasi kebijakan di bidang Administrasi Umum
	Belum optimalnya pelaporan akuntabilitas daerah	Belum optimalnya budaya e-government dan upaya peningkatan pendapatan daerah		Regulasi terkait penilaian akuntabilitas pemerintahan		

Mengacu pada isu-isu strategis yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pemalang, maka dapat diidentifikasi isu strategis yang harus diselesaikan Sekretariat Daerah sebagai berikut :

a. Peningkatan efisiensi dan efektifitas implementasi kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Diharapkan dengan adanya hal tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang dapat memberikan andil dalam pencapaian suksesi Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Peningkatan efisiensi dan efektifitas implementasi kebijakan daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan. Diharapkan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang dapat mengambil peran dalam mengawal implementasi kebujakan dalam peningkatan pertumbuhan ekonoi daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat.
c. Peningkatan efisiensi dan efektifitas implementasi kebijakan daerah di bidang Administrasi Umum. Sekretariat Daerah diharpkan dapat melaksanakan fungsi koordinatif dan evaluatif atas kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas administrasi umum atas pelaksanaan tata kelola pemerintahan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang ada serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 menyebutkan bahwa dalam menghadapi tantangan keadaan Kabupaten Pemalang dalam 5 tahun ke depan dan dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki dalam konstelasi lokal regional maupun nasional, maka Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pemalang terpilih merumuskan visi pembangunan sebagai berikut "**PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA**". Visi ini memiliki pembentuk kata :

1. **Bersih**, Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan.
2. **Cakap,** dimaknai memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
3. **Handal**, dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.
4. **MULYA: Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya**. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius.

Guna mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 6 misi sebagai berikut:

a. **Misi 1 Resik**: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih. Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas

https://jdih.pemalangkab.go.id

udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik

b. **Misi 2 Hijau**: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sector unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau, yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan) yang ramah lingkungan, industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM dimasyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.
c. **Misi 3 Apik**: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penaatan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dari Desa.
d. **Misi 4 Peduli**: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi
e. **Misi 5 Silaturahmi**: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong,tepa selira dan sejahtera Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, dan saling menghormati dan teposliro
f. **Misi 6 Organisatoris**: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan Good Governance, Clean Governance dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.
g. **Misi 7 Digitalisasi**: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar Misi ini mengandung pengertian Pemerintah kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi.
h. **Misi 8 Ikhlas**: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan Misi ini mengandung pengertian Pemerintah

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkan kearifan dan budaya lokal

Adapun keterkaitan Visi dengan Misi Kabuaten Pemalang 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) **Frase Bersih dan Handal** dalam Visi akan dicapai dengan **Misi 1 Resik**: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih; **Misi 6 Organisatoris**: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi dan **Misi 7 Digitalisasi**: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar.
2) **Frase Cakap** dalam Visi akan dicapai dengan **Misi 2 Hijau**: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan; **Misi 3 Apik**: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah dan **Misi 4 Peduli**: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat
3) **Frase MULYA** dalam Visi akan dicapai dengan **Misi 5 Silaturahmi**: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong,tepa selira dan sejahtera dan **Misi 8 Ikhlas**: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan

RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 menjadi pedoman kerja bagi seluruh PD, DPRD dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan. RPJMD juga digunakan untuk memantau kinerja dan perkembangan pembangunan daerah. RPJMD ini akan menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra-PD). Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMD ini akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang, Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administif. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Pemalang dalam kurun waktu lima tahun kedepan maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang mendukung **Frasa Bersih dan Handal** yang selanjutnya dicapai melalui tujuan daerah **Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel** serta sasaran daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id

Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik.

Mendasarkan hal tersebut, Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang 2025-2029 adalah **"Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien".**

Tujuan tersebut akan diwujudkan melalui pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
2. Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
3. Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Administrasi Umum.

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian sasaran dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang sebanyak 4 indikator.

Indikator pada masing-masing sasaran adalah pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2025- 2029

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1.	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.	1.	Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2.	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	2.	Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan
3.	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Administrasi Umum	3.	Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang Administrasi Umum

https://jdih.pemalangkab.go.id

Berdasarkan uraian di atas kita dapat melihat penjabaran sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja organisasi secara vertikal dan horizontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam kinerja sekretariat daerah Kabupaten Pemalang dalam Cascading visi, misi daerah ke perangkat daerah sebagai berikut:

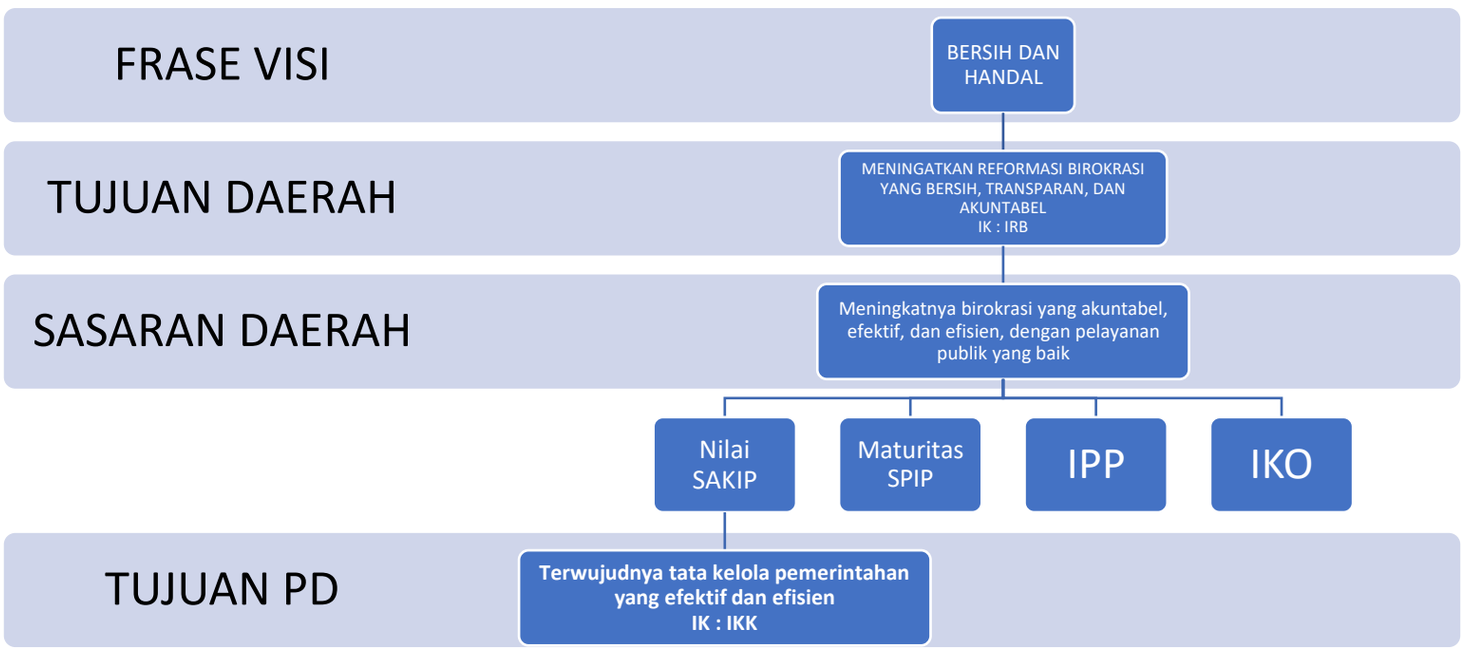

https://jdih.pemalangkab.go.id

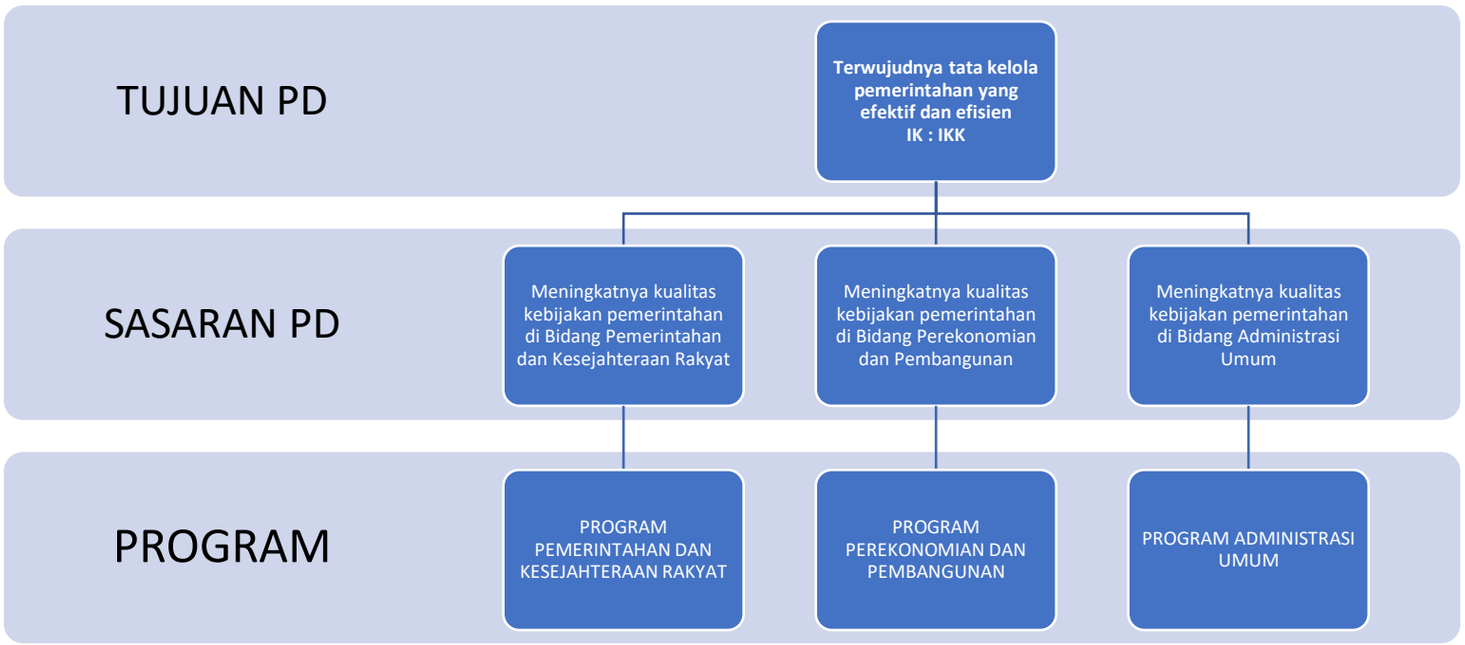

Bagan 3.1 Cascading Visi dan Misi Daerah, Tujuan dan Sasaran Daerah, Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

TABEL 3.2

Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang

Tahun 2025 – 2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya birokrasi yang akuntabel, efektif, dan efisien, dengan pelayanan publik yang baik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		IKK	70.70	70.75	70.80	70.85	70.90	70.95
		Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang pemkesra	35	35.1	35.2	35.3	35.4	35.5
		Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan	35	35.1	35.2	35.3	35.4	35.5
		Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Administrasi Umum	Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang Administrasi Umum	35	35.1	35.2	35.3	35.4	35.5

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi memiliki makna rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Dalam penentuan strategi, Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang tidak terlepas dari strategi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik. Sasaran ini memiliki strategi peningkatan akuntabilitas pembangunan melalui peningkatan kualitas perencanaan, kinerja dan pelaporan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Peningkatan maturitas elola pengendalian intern melalui peningkatan komitmen pemerintah dalam menjalankan pembangunan, penguatan kebijakan dan regulasi, peningkatan kapabilitas APIP, peningkatan kualitas dan profesionalisme pegawai, penguatan manajemen resiko, digitalisasi, serta evaluasi berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, instansi pemerintah dapat mencapai tata elola yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif, sehingga mempercepat keberhasilan reformasi birokrasi . Peningkatan kualitas pelayanan elola dengan mengimplementasikan SOP dan SPP, mewujudkan pelayanan berbasis digital, mudah dan murah.

Strategi RPJMD Kabupaten Pemalang 2025-2029 dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut:

Tahun 2026 Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing Sumberdaya manusia. Prioritas pembangunan adalah memperkuat pertanian sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan. Penguatan petani milenial. Peningkatan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemertaan pembangunan. Peningkatan daya saing SDM baik elola y maupun elola y . Penanganan anak tidak sekolah sebagai upaya mendorong daya saing SDM. Peningkatan perilaku hidup sehat dan kualitas pelayanan. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pemantapan pengelolaan sampah. Peningkatan tata elola pemerintahan yang mampu menciptakan Good and Clean Government.

Tahun 2027 Mengembangkan potensi perekonomian melalui pembangunan pariwisata terintegrasi, elola y bidang pertanian dan perikanan serta pengembangan UMKM. Memperkuat daya saing ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan pembangunan pariwisata, memperkuat industrialisasi bidang pertanian dan perikanan. Peningkatan pendapatan masyarakat dengan mendorong jiwa kewirausahaan dan penguatan UMKM. Pengembangan infrastruktur dalam pengembangan potensi perekonomian daerah. Penguatan daya saing SDM dalam mendorong daya saing ekonomi. Penguatan elola y hijau dan ekonomi sirkuler. Pengelolaan sampah akibat elola y menjadi prioritas.

Tahun 2028 Mempercepat pembangunan perkotaan dan perdesaan guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi dan modernisasi. Peningkatan kualitas pembangunan perkotaan, penataan wialayah perkotaan, membangun area elola yang mendorong aktivitas masyarakat dan ekonomi masyarakat. Memperkuat hilirisasi dan modernisasi. Meningkatkan pembangunan desa sebagai upaya pemerataan pembangunan. Penguatan digitalisasi pelayanan elola, mendorong Smart Village dalam menata desa. Pengembangan Kawasan perdesaan yang mampu mendorong pengembangan elola unggulan. Penguatan tata elola yang mampu mewujudkan penataan perkotaan dan perdesaan. Meningkatkan daya saing SDM kota dan desa dalam mempercepat pembangunan perkotaan dan perdesaan.

Tahun 2029 Mewujudkan daya saing daerah menuju Pemalang Bersih, Cakap, Handal dan Mulya (BERCAHAYA). Pemantapan daya saing daerah baik ekonomi dan SDM, pemantapan kualitas lingkungan menjadikan Pemalang bersih, pemantapan tata elola pemerintahan. Pemantapan harmonisasi pembangunan, sinergitas dan kondusivitas wilayah.

Tahun 2030 Terwujudnya pondasi transformasi menuju akselerasi transformasi untuk mencapai Pemalang MULYA. Tahun ini merupakan transisi pada periode I menuju periode II RPJPD.

Mendasarkan pada strategi RPJMD Kabupaten Pemalang 2025-2029 serta hasil analisis SWOT, maka strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

TABEL 3.3

Strategi dan Arah Kebijakan
Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang 2025-2029

Visi	PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA
Frasa Visi	Bersih dan Handal
Misi	Organisatoris
Tujuan Daerah	Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel IK : IRB
Sasaran Daerah	Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik IK : Nilai SAKIP

Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien .	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah	1. Optimalisasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan pemerintahan 2. Meningkatkan ketepatan maupun kualitas penyusunan pelaporan-pelaporan pemerintahan daerah
		2. Optimalisasi kerjasama maupun sinergi	1. Melakukan integrasi kebutuhan kerjasama daerah dalam dokumen perencanaan perangkat daerah 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kerjasama maupun sinergi dengan pihak lain

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
		3. Peningkatan Penataan dan Kualitas Peraturan Perundangan-undangan	1. Meningkatkan kompetensi SDM penyusun produk hukum daerah 2. Meningkatkan pengkajian dan sinkronisasi produk hukum daerah 3. Optimalisasi Pelayanan bantuan hukum. 4. Meningkatkan kualitas dokumentasi dan publikasi produk hukum daerah. Meningkatkan efisensi dan efektifitas pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait.
		4. Peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan pada upaya peningkataan kesejahteraan rakyat	1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada penyusunan, implementasi dan evaluasi kebijakan layanan pemerintahan di bidang bina mental. 2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada penyusunan, implementasi dan evaluasi kebijakan layanan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada penyusunan, implementasi dan evaluasi kebijakan layanan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
			pemerintahan di bidang pengentasan kemiskinan
	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang perekonomian dan pembangunan	Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan dalam pengembangan perekonomian daerah	1. Melakukan penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan dalam pengelolaan BUMD dan BLUD 2. Melakukan penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan dalam pengelolaan distribusi barang dan jasa pokok 3. Meningkatkan sinergi dengan instansi terkait guna pengembangan lembaga keuangan mikro
		Meningkatkan efektifitas pemantauan implementasi kebijakan SDA	Meningkatkan efektifitas hasil pelaksanaan koordinasi dan konsultansi implementasi kebijakan pemanfaatan SDA untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.
		5. Peningkatan efisiensi dan efektivitas tata kelola pengadaan barang dan jasa	1. Meningkatkan kompetensi SDM Pengadaan Barang dan Jasa Optimalisasi pemanfaata e-katalog dalam proses PBJ
		6. Peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaporan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
		pengendalian pembangunan	pelaksanaan pembangunan
	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang administrasi umum	1. Peningkatan kualitas pelayanan public	Melakukan pembinaan dan pendampingan dalam peningkatan kualitas layanan publik.
		2. Peningkatan Akuntabitas pelaporan kinerja	1. Melakukan pembinaan dan pendampingan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. 2. Peningkatan kompetensi SDM penyusun pelaporan Akuntabilitas kinerja Mendorong pemanfaatan laporan kinerja untuk perbaikan kinerja.

aktivitas pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah dilakukan penahapan yang selaras dengan penahapan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029. Adapun penahapan program prioritas pada Sekretariat Daerah diarahkan sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

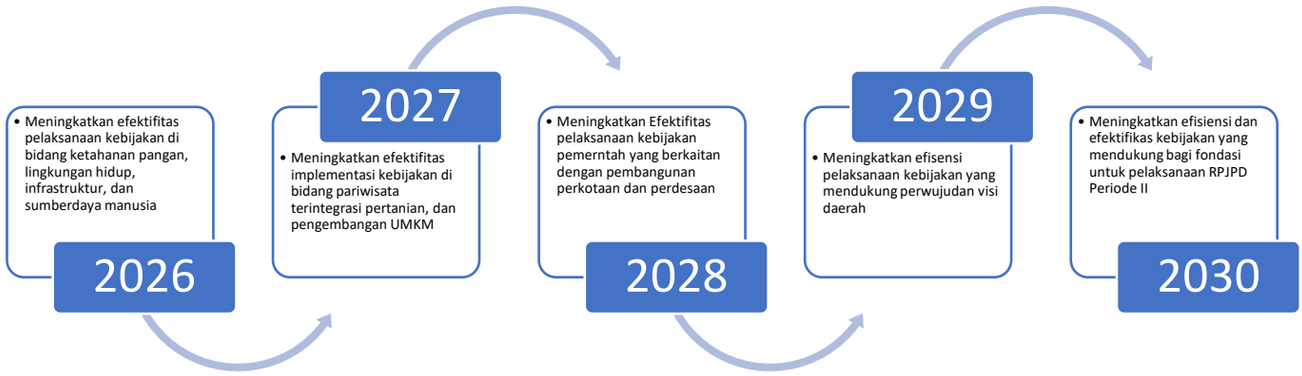

Bagan 3.2 Penahapan pelaksanaan Program Prioritas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang

Tabel 3.4 Penahapan pelaksanaan Program Prioritas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang

TAHAP I (2026)	TAHAP I (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, lingkungan hidup, infrastruktur, dan sumberdaya manusia	Meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan di bidang pariwisata terintegrasi pertanian, dan pengembangan UMKM	Meningkatkan Efektifitas pelaksanaan kebijakan pemerntah yang berkaitan dengan pembangunan perkotaan dan perdesaan	Meningkatkan Efektifitas pelaksanaan kebijakan pemerntah yang berkaitan dengan pembangunan perkotaan dan perdesaan	Meningkatkan efisiensi dan efektifikas kebijakan yang mendukung bagi fondasi untuk pelaksanaan RPJPD Periode II

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program

Mendasarkan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Program disusun dengan memperhatikan sub bidang urusan seauai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Program yang akan dilaksanakan diharapkan dapat menjawab berbagai isu strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang, khususnya pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.

Program-program pembangunan yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 diharapkan mampu memberikan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan menjalankan tugas pokok dan fungsi utama Sekretariat Daerah sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang, Program yang diampu sepenuhnya diarahkan untuk pelaksanaan koordinasi guna pencapaian indikator tujuan maupun sasaran daerah yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan lima tahunan. Hal ini memang tidak secara langsung berdaampak terhadap pencapaian indicator, namun secara tidak langsung, pelakanaan program, kegiatan, maupun sub kegiatan, diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah. Berikut ini adalah program Sekretariat Daerah yang digunakan dalam pencapaian Visi RPJMN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPD Kabupaten Pemalang pada tahun 2025-2029.

Tabel 4.1

Persandingan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, RPJMD Kabupaten Pemalang dan Program pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang

Visi RPJMN	Visi RPJP Provinsi	Visi RPJMD Kabupaten	Program
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan	Organisatoris: Meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani	• Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. • Program Perekonomian

https://jdih.pemalangkab.go.id

Visi RPJMN	Visi RPJP Provinsi	Visi RPJMD Kabupaten	Program
judi, dan penyelundupan	mengedepankan nilai-nilai Integritas	dan mengayomi	dan Pembangunan • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota

4.2 Kegiatan

Kegiatan disusun mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan berfungsi menterjemahkan kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan yang disusun secara tahunan ini menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program yang berdimensi waktu 5 (lima) tahun.

4.3 Sub Kegiatan

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Sub kegiatan merupakan bentuk konkrit aktivitas yang akan menopang kinerja kegiatan, dan menjadi tolok ukur kinerja awal pencapaian indikator yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang, berikut ini adalah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian Program Prioritas Daerah maupun Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah:

Tabel 4.2

Sasaran, Program dan Kegiatan
Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya birokrasi yang akuntabel, efektif, dan efisien,	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien				IKK		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
dengan pelayanan publik yang baik							
		Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Administrasi Umum			Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang Administrasi Umum		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kebijakan pemerintahan bidang adm. Umum		Nilai SAKIP Setda Skor IKM Pemda Nilai SAKIP Pemda Komponen Pelaporan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD.	
				Meningkatnya kualitas layanan umum Setda	Persentase Meningkatnya kualitas layanan umum setda	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Persentase Meningkatnya kualitas layanan umum setda	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.	
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.	
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	
					Persentase Meningkatnya kualitas layanan umum setda	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu.	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	
					Persentase Meningkatnya kualitas layanan umum setda	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	
						Pengadaan Mebel.	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	
					Persentase Meningkatnya kualitas	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					layanan umum setda	Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	
					Persentase Meningkatnya kualitas layanan umum setda	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	
						Pemeliharaan Mebel.	
						Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	
					Persentase meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	
						Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	
						Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	
					Persentase Meningkatnya kualitas layanan umum setda	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah.	
						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah.	
						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.	
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintah daerah	Indeks Organisasi	Penataan Organisasi	
						Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan.	
						Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana.	
						Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.	
						Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana.	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.	
					Persentase Meningkatnya kualitas layanan umum setda	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
						Fasilitasi Keprotokolan.	
						Fasilitasi Komunikasi Pimpinan.	
						Pendokumentasian Tugas Pimpinan.	
		Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan bidang		IRH Persentase kebijakan di bidang tata	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		pemerintahan yang dihasilkan Persentase fasilitasi kerjasama yang terselesaikan Persentase kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang dihasilkan		
				meingkatnya kepatuhan dan tertib administrasi tata pemerintahan	Persentase terlaksananya kepatuhan dan tertib administrasi tata pemerintahan	Administrasi Tata Pemerintahan	
						Penataan Administrasi Pemerintahan.	
						Pengelolaan Administrasi Kewilayahan.	
						Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.	
				Meningkatnya kualitas penanganan permasalahan di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, dan kesejahteran masyarakat	Persentase kebijakan kesra yang dilaksanakan	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
						Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual.	
						Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial.	
						Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat.	
				Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi di bidang hukum daerah	Persentase terlaksananya koordinasi dan fasilitasi hukum daerah	Fasilitasi dan koordinasi Hukum	
						Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah.	
						Fasilitasi Bantuan Hukum.	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.	
				Meningkatnya peran kerjasama dan sinergi daerah dalam pelaksanaan pembangunanda erah	Persentase kerjasama dan sinergi yang ditindaklanjuti	Fasilitasi Kerjasama Daerah	
						Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri.	
						Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri.	
						Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.	
		Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan bidang Perekonomian dan pembangunan			Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan		
			Persentase peningkatan kualitas kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan daerah		ITKP Persentase kebijakan di bidang perekonomian daerah yang dihasilkan Persentase kebijakan pemanfaatan SDA yang dipantau Persentase kebijakan di bidang adpemb yang dihasilkan	Program Perekonomian dan Pembangunan	
				Meningkatnya kualitas penanganan permasalahan di pengelolaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, serta Lembaga Ekonomi Mikro	Persentase kebijakan perekonomian yang dilaksanakan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
						Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD.	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pengendalian dan Distribusi Perekonomian.	
						Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil.	
				Meningkatnya kualitas pengendalian pembangunan	Perentase Meningkatya kualitas pengendalian pembangunan daerah	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
						Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan.	
						Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan.	
						Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.	
				Meningkatnya efisiensi pengadaan barang dan jasa	Persentase Meningkatya efisiensi pengelolaan barang dan jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
						Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.	
						Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik.	
						Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.	
				Meningkatnya kualitas pemantauan pemanfaatan SDA	Persentase kualitas pemantauan pemanfaatan SDA	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan.	
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambang an dan Lingkungan Hidup.	
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.3

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2025 – 2029

dalam ribuan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien				**Skor IKK**	**70,67**	**70,70**	**64544351**	**70,75**	**54544351**	**70,80**	**54544351**	**70,85**	**53584351**	**70,90**	**64544351**	**70,90**	**54330126**	
	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Administrasi Umum			**Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang Administrasi Umum**	**NA**	**35,00**	**36318979**	**35,10**	**36318979**	**35,20**	**36318979**	**35,30**	**35358979**	**35,40**	**36318979**	**35,40**	**36318979**	
		4.01. 01.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.**	**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan bidang Administrasi Umum**	**60.29**	84,59	36318979	84,85	36318979	85,12	36318979	85,38	35358979	87,50	36318979	87,50	36318979	**Bagian Umum Bagian Organisasi Bagian Prokompin**
		4.01. 01. 2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**	**Rata-rata IKM Setda**	**83,64**	83,67	27500	83,70	27500	83,73	27500	83,76	5000	87,5	5000	87,5	5000	**Bagian Umum**
		4.01. 01. 2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	**3.00**	3	27500	3	27500	3	27500	3	5000	3	5000	3	5000	Bagian Umum

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4.01. 01. 2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**	**Rata-rata IKM Setda**	**83,64**	83,67	21958793	83,70	21958793	83,73	21958793	83,76	21909001	87,5	21911293	87,5	21911293	**Bagian Umum**
		4.01. 01. 2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN.	**1,585**	153	21867443	153	21867443	153	21867443	153	21867443	153	21867443	153	21867443	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.02. 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.	**12**	12	80150	12	80150	12	80150	12	30358	12	32650	12	32650	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	**1**	1	6600	1	6600	1	6600	1	6600	1	6600	1	6600	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD.	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan.	**1**	1	4600	1	4600	1	4600	1	4600	1	4600	1	4600	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.03.	**Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.**	**Rata-rata IKM Setda**	**83,64**	83,67	5500	83,70	5500	83,73	5500	83,76	5500	87,5	5500	87,5	5500	**Bagian Umum**
		4.01. 01. 2.03. 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.	**2**	1	5500	1	5500	1	5500	1	5500	1	5500	1	5500	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.**	**Rata-rata IKM Setda**	**83,64**	83,67	104158	83,70	104158	83,73	104158	83,76	54158	87,5	104158	87,5	104158	**Bagian Umum**

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4.01. 01. 2.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan.	**4**	1	35000	1	35000	1	35000	1	35000	1	35000	1	35000	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.05. 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.	**1**	1	4625	1	4625	1	4625	1	4625	1	4625	1	4625	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.05. 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.	**112**	50	50000	50	50000	50	50000	50		50	50000	50	50000	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	**13**	13	14533	13	14533	13	14533	13	14533	13	14533	13	14533	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rata-rata IKM Setda**	**83,64**	83,67	1529558	83,70	1529558	83,73	1529558	83,76	1529558	87,5	1529558	87,5	1529558	**Bagian Umum**
		4.01. 01. 2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan.	**4**	12	85000	12	85000	12	85000	12	85000	12	85000	12	85000	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan.	**12**	12	28725	12	28725	12	28725	12	28725	12	28725	12	28725	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan.	**12**	12	287873	12	287873	12	287873	12	287873	12	287873	12	287873	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan.	**12**	12	25000	12	25000	12	25000	12	25000	12	25000	12	25000	Bagian Umum

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4.01. 01. 2.06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan.	**12**	12	88500	12	88500	12	88500	12	88500	12	88500	12	88500	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan.	**12**	12	89460	12	89460	12	89460	12	89460	12	89460	12	89460	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu.	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu.	**12**	12	250000	12	250000	12	250000	12	250000	12	250000	12	250000	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	**12**	12	675000	12	675000	12	675000	12	675000	12	675000	12	675000	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**	**Rata-rata IKM Setda**	**83,64**	83,67	600000	83,70	320000	83,73	320000	83,76	130000	87,5	320000	87,5	320000	**Bagian Umum**
		4.01. 01. 2.07. 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan.	**1**	1	350000	2	70000	2	70000	2		2	70000	2	70000	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.07. 05	Pengadaan Mebel.	Jumlah Paket Mebel yang disediakan.	**24**	15	100000	15	100000	15	100000	15	100000	15	100000	15	100000	Bagian Umum
		4.01.01. 2.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan.	**25**	15	150000	15	150000	15	150000	15	30000	15	150000	15	150000	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**	**Rata-rata IKM Setda**	**83,64**	83,67	3670355	83,70	3670355	83,73	3670355	83,76	3670355	87,5	3670355	87,5	3670355	**Bagian Umum**

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4.01. 01. 2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	**12**	12	22250	12	22250	12	22250	12	22250	12	22250	12	22250	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan.	**12**	12	1110000	12	1110000	12	1110000	12	1110000	12	1110000	12	1110000	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan.	**12**	12	200000	12	200000	12	200000	12	200000	12	200000	12	200000	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**12**	130	2338105	130	2338105	130	2338105	130	2338105	130	2338105	130	2338105	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**	**Rata-rata IKM Setda**	**83,64**	83,67	1820430	83,70	2034138	83,73	2034138	83,76	1326430	87,5	2034138	87,5	2034138	**Bagian Umum**
		4.01. 01. 2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.	**6**	8	228600	8	228600	8	228600	8	228600	8	228600	8	228600	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya.	**153**	150	404550	150	618258	150	618258	150	404550	150	618258	150	618258	Bagian Umum

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4.01. 01. 2.09. 05	Pemeliharaan Mebel.	Jumlah Mebel yang dipelihara.	**83**	75	85000	75	85000	75	85000	75	85000	75	85000	75	85000	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.09. 09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi.	**2**	7	994000	7	994000	7	994000	7	500000	7	994000	7	994000	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.09. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi.	**222**	147	108280	147	108280	147	108280	147	108280	147	108280	147	108280	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.**	**Rata-rata IKM Setda**	**83,64**	83,67	1228978	83,70	1228978	83,73	1228978	83,76	1228978	87,5	1228978	87,5	1228978	**Bagian Umum**
		4.01. 01. 2.11. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan.	**12**	2	978978	2	978978	2	978978	2	978978	2	978978	2	978978	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.11. 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan.	**12**	12	200000	12	200000	12	200000	12	200000	12	200000	12	200000	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.11. 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	**2**	4	50000	4	50000	4	50000	4	50000	4	50000	4	50000	Bagian Umum

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4.01. 01. 2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah.**	**Rata-rata IKM Setda**	**83,64**	83,67	4250000	83,70	4250000	83,73	4250000	83,76	4250000	87,5	4250000	87,5	4250000	**Bagian Umum**
		4.01. 01. 2.12. 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah.	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan.	**12**	12	2000000	12	2000000	12	2000000	12	2000000	12	2000000	12	2000000	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.12. 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah.	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan.	**-**	12	1500000	12	1500000	12	1500000	12	1500000	12	1500000	12	1500000	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.12. 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan.	**12**	12	750000	12	750000	12	750000	12	750000	12	750000	12	750000	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.13	**Penataan Organisasi**	**Rata-rata IKM Pemda**	**85.09**	85,5	573708	86,0	640000	86,5	640000	87,0	700000	87,5	710000	87,5	710000	**Bagian Organisasi**
		4.01. 01. 2.13. 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan.	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan.	**2**	4	250000	4	250000	4	250000	4	300000	4	300000	4	300000	Bagian Organisasi
		4.01. 01. 2.13. 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana.	**2**	6	116956	6	150000	6	150000	6	160000	6	160000	6	160000	Bagian Organisasi
		4.01. 01. 2.13. 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.	**2**	2	70000	2	70000	2	70000	2	70000	2	70000	2	70000	Bagian Organisasi
		4.01. 01. 2.13. 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana.	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan	**2**	2	46753	3	80000	3	80000	3	80000	3	90000	3	90000	Bagian Organisasi

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Publik dan Tata Laksana														
		4.01. 01. 2.13. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.	**1**	2	90000	2	90000	2	90000	2	90000	2	90000	2	90000	Bagian Organisasi
		4.01. 01. 2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.**	**Rata-rata IKM Setda**	**83,64**	83,67	550000	83,70	550000	83,73	550000	83,76	550000	83,8	550000	83,8	550000	**Bagian Prokompin**
		4.01. 01. 2.14. 01	Fasilitasi Keprotokolan.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan.	**12**	12	200000	12	200000	12	200000	12	200000	12	200000	12	200000	Bagian Prokompin
		4.01. 01. 2.14. 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan.	**12**	12	100000	12	100000	12	100000	12	100000	12	100000	12	100000	Bagian Prokompin
		4.01. 01. 2.14. 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan.	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan.	**12**	12	250000	12	250000	12	250000	12	250000	12	250000	12	250000	Bagian Prokompin
	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	NA	35,0	26770912	35,1	16770912	35,2	16770912	35,3	16770912	35,4	26770912	35,4	16556687	
		4.01. 02.	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.**	**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan bidang pemkesra**	**104.66**	98,93	26770912	98,94	16770912	98,95	16770912	98,96	16770912	99	26770912	99	16556687	**Bagian Tapem Bagian Kesra Bagian Hukum**
		4.01. 02. 2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan.**	**% kebijakan di bidang tata**	**NA**	100	509217	100	600000	100	697500	100	852625	100	1238281	100	1238281	**Bagian Tapem**

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				pemerintahan yang dihasilkan *)														
		4.01. 02. 2.01. 01	Penataan Administrasi Pemerintahan.	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan.	**2**	7	188102	14	150000	14	187500	14	234375	14	292969	14	292969	Bagian Tapem
		4.01. 02. 2.01. 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan.	**2**	2	99030	2	100000	2	125000	2	156250	2	195313	2	195313	Bagian Tapem
		4.01. 02. 2.01. 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.	**4**	4	222086	3	350000	3	385000	3	462000	3	750000	3	750000	Bagian Tapem
		4.01. 02. 2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.**	**% kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang dihasilkan**	**NA**	100	25831726	100	15617501	100	15465001	100	15241126	100	24769532	100	14555307	**Bagian Kesra**
		4.01. 02. 2.02. 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual.	**4**	4	25631877	4	15417652	4	15265152	4	15041277	4	24569683	4	14355458	Bagian Kesra
		4.01. 02. 2.02. 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial.	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan	**2**	1	111849	1	111849	1	111849	1	111849	1	111849	1	111849	Bagian Kesra

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB.														
		4.01. 02. 2.02. 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat.	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas.	**1**	1	88000	1	88000	1	88000	1	88000	1	88000	1	88000	Bagian Kesra
		4.01. 02. 2.03	**Fasilitasi dan koordinasi Hukum.**	**Indeks Reformasi Hukum**	**96.72**	96,80	333411	96,83	333411	96,86	333411	96,89	333411	97,00	333411	97,00	333411	**Bagian Hukum**
		4.01. 02. 2.03. 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah.	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun.	**766**		112181		112181		112181		112181		112181		112181	Bagian Hukum
		4.01. 02. 2.03. 02	Fasilitasi Bantuan Hukum.	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum.	**3**		126470		126470		126470		126470		126470		126470	Bagian Hukum
		4.01. 02. 2.03. 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.	Jumlah Produk Hukum dan Informasi Hukum yang didokumentasi.	**766**		94760		94760		94760		94760		94760		94760	Bagian Hukum
		4.01. 02. 2.04	**Fasilitasi Kerjasama Daerah.**	**% kebijakan di bidang tata**	**NA**	100	96558	100	220000	100	275000	100	343750	100	429688	100	429688	**Bagian Tapem**

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				pemerintahan yang dihasilkan *)														
		4.01. 02. 2.04. 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri.	**17**	10	74628	10	150000	10	187500	10	234375	10	292969	10	292969	Bagian Tapem
		4.01. 02. 2.04. 02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri.	**1**	1	17500	1	50000	1	62500	1	78125	1	97656	1	97656	Bag Tapem
		4.01. 02. 2.04. 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.	**2**	2	4430	2	20000	2	25000	2	31250	2	39063	2	39063	Bagian Tapem
	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan bidang Perekonomian dan Pembangunan			Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang Perekonomian dam Pembangunan		35,0	1454459	35,1	1454459	35,2	1454459	35,3	1454459	35,4	1454459	35,4	1454459	
		4.01. 03.	**Program Perekonomian dan Pembangunan.**	**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan bidang Perekonomian dan pembangunan**	**NA**	93,67	1454459	95,33	1454459	97,00	1454459	98,67	1454459	99,33	1454459	99,33	1454459	**Bag. Perekonomian Bagian Adpemb Bagian PBJ**
		4.01. 03. 2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian.**	**% kebijakan di bidang perekonomian daerah yang dihasilkan**	**NA**	100	308582	100	308582	100	308582	100	308582	100	308582	100	308582	**Bagian Perekonomian**
		4.01. 03. 2.01. 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	**3**	3	252069	4	252069	4	252069	4	252069	4	252069	4	252069	Bagian Perekonomian

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Pengelolaan BUMD dan BLUD.														
		4.01. 03. 2.01. 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian.	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian.	**4**	4	40859	4	40859	4	40859	4	40859	4	40859	4	40859	Bagian Perekonomian
		4.01. 03. 2.01. 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil.	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.	**1**	1	15654	1	15654	1	15654	1	15654	1	15654	1	15654	Bagian Perekonomian
		4.01. 03. 2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan.**	**% kebijakan di bidang adpemb yang dihasilkan**	**NA**	100	285725	100	285725	100	285725	100	285725	100	285725	100	285725	**Bagian Adpemb**
		4.01. 03. 2.02. 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah.	**6**	6	47222	6	47222	6	47222	6	47222	6	47222	6	47222	Bagian Adpemb
		4.01. 03. 2.02. 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan.	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan.	**4**	4	180238	4	180238	4	180238	4	180238	4	180238	4	180238	Bagian Adpemb
		4.01. 03. 2.02. 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.	**4**	4	58265	4	58265	4	58265	4	58265	4	58265	4	58265	Bagian Adpemb
		4.01. 03. 2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.**	**ITKP**	**71**	81	372074	86	372074	91	372074	96	372074	98	372074	98	372074	**Bagian PBJ**
		4.01. 03. 2.03. 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.	**62**	20	87709	23	87709	26	87709	30	87709	30	87709	30	87709	Bagian PBJ

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4.01. 03. 2.03. 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik.	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik.	**4**	4	266082	4	266082	4	266082	4	266082	4	266082	4	266082	Bagian PBJ
		4.01. 03. 2.03. 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.	**20**	40	18284	50	18284	50	18284	50	18284	50	18284	50	18284	Bagian PBJ
		4.01. 03. 2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.**	**% kebijakan di bidang perekonomian daerah yang dihasilkan**	**NA**	100	488078	100	488078	100	488078	100	488078	100	488078	100	488078	**Bagian Perekonomian**
		4.01. 03. 2.04. 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja.	**2**	2	467489	2	467489	2	467489	2	467489	2	467489	2	467489	Bagian Perekonomian
		4.01. 03. 2.04. 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambang an dan Lingkungan Hidup.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian.	**1**	1	9093	1	9093	1	9093	1	9093	1	9093	1	9093	Bagian Perekonomian

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4.01. 03. 2.04. 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan.	2	3	11496	3	11496	3	11496	3	11496	3	11496	3	11496	Bagian Perekonomian

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.4 Indikator Kinerja Urama dan Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau pun kualitatif yang mengindikasikan pencapaian program dan atau kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah disepakati atau ditetapkan. Penentuan Kelompok Sasaran kegiatan seoptimal mungkin harus jelas dan spesifik, sehingga memberikan gambaran yang rinci mengenai kelompok sasaran dari kegiatan yang akan dilakukan.

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja dengan indikasi yang baik dan menggambarkan kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktifitasnya.

Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencana sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah tercapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif kebenarannya. Adapun dari indikator kinerja

TABEL 4.4

Target Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai	35	35.1	35.2	35.3	35.4	35.5	
2	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Administrasi Umum	Nilai	35	35.1	35.2	35.3	35.4	35.5	
3	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai	35	35.1	35.2	35.3	35.4	35.5	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Adapun indikator kinerja Kunci yang akan dicapai melalui Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

TABEL 4.5

Target Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah 2025-2029

No	Indikator RPJMD	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Skor	9.90	10,3	10,4	10,6	10,6	10,9
2	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Nilai	56.34	56,90	57	57,10	57,30	57,5

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB V
P E N U T U P

Dalam rangka mewujudkan *Good Governance* dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Pemalang harus terus meningkatkan efektifitas, efensiensi dan inovasi pelaksanaan manajemen pelayanan publik dalam kerangka Visi "**Pemalang BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA".** Visi tersebut menjadi acuan dari gerak dan langkah seluruh komponen dan elemen dilingkungan Sekreatariat Daerah. Diperlukan satu pemahaman dari semua unsur guna menciptakan keselarasan dalam mewujudkan visi dimaksud. Kemudian pada setiap akhir tahun juga perlu dilakukan evaluasi dan kajian terhadap kemajuan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 ini disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor .... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) ini juga merupakan kerangka acuan bagi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang yang disusun setiap tahunnya.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang, berisi program-program dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya indikatif, yang telah disesuaikan dengan Program dan Kegiatan yang ada pada masing – masing Bagian yang ada di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang. Sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan anggaran/dana yang tersedia.

Dalam pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan dan peraturan perundang-undangan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Renstra Sekretariat Daerah 2025 - 2029 yang akan terwujud dalam Perubahan Renstra Sekretariat Daerah 2025 - 2029.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat Daerah ini belum sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami perlukan demi perbaikan Renstra ini. Dan kami berharap agar Rencana Strategis (Renstra) ini dapat diimplementasikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

HERIYANTO, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680214 199103 1 014

https://jdih.pemalangkab.go.id

B. RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasar pasal 204 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sekretariat DPRD dibentuk dalam rangka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD. Sedangkan berdasarkan pasal 343 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, fungsi DPRD adalah legislasi, anggaran dan pengawasan. Hal ini selaras dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang, bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sebagai institusi yang bertugas memberikan pelayanan administrasi dan dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang secara proaktif berperan dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Fungsi legislasi DPRD bersama Kepala Daerah membentuk peraturan daerah yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Fungsi anggaran dilakukan dalam proses pembahasan kebijakan anggaran pemerintah daerah agar mendukung kesejahteraan rakyat. Fungsi pengawasan dilakukan dalam rangka memastikan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan. Ketiga fungsi pokok DPRD tersebut secara signifikan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agar tujuan tersebut dapat tercapai harus didukung oleh perencanaan yang baik sehingga perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang sebagai salah satu Perangkat Daerah harus menyusun Renstra. Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang merupakan bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih dilaksanakan simultan atau

https://jdih.pemalangkab.go.id

beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kemendagri.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Renstra menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan keterkaitan antara tujuan dan sasaran Daerah dengan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, dimana program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang harus mendukung tujuan dan sasaran Daerah sehingga visi dan misi Daerah dapat tercapai.

Dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang. Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

https://jdih.pemalangkab.go.id

Proses penyusunan Renstra meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1) Persiapan Penyusunan Renstra PD, terdiri dari pembentukan tim penyusun Renstra PD, orientasi mengenai Renstra PD, penyiapan agenda kerja tim penyusun Renstra PD, penyiapan data dan informasi; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD; (3) Penyusunan Rancangan Renstra PD; (4) Forum Perangkat Daerah; (5) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD; dan (6) Penetapan Renstra PD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5)
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia (LN) 2024 Nomor 194, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLN) Nomor 6987);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

https://jdih.pemalangkab.go.id

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

https://jdih.pemalangkab.go.id

Nomor 927);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025–2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2024 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengarusutramaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10)
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2);
34. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2023 Nomor 40).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi kerangka dasar peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjan pencaaian target kinerja pembangunan daerah tertama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan;
2. Memberikan arah dalam melayani masyarakat sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen aparatur Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah disepakati bersama.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang selama kurun waktu 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
3. Memberikan pedoman bagi oenyusunan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang yang memuat program dan kegiatan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan
2. Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang serta penentuan isu strategis
3. Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, berisi tujuan, sasaran jangka menengah serta arah kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dalam 5 (lima) tahun mendatang
4. Bab IV Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang
5. Bab V Penutup, berisi kaidah pelaksanaan renstra, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi serta pelaksanaan berdasarkan urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran pelayanan

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1.1
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang

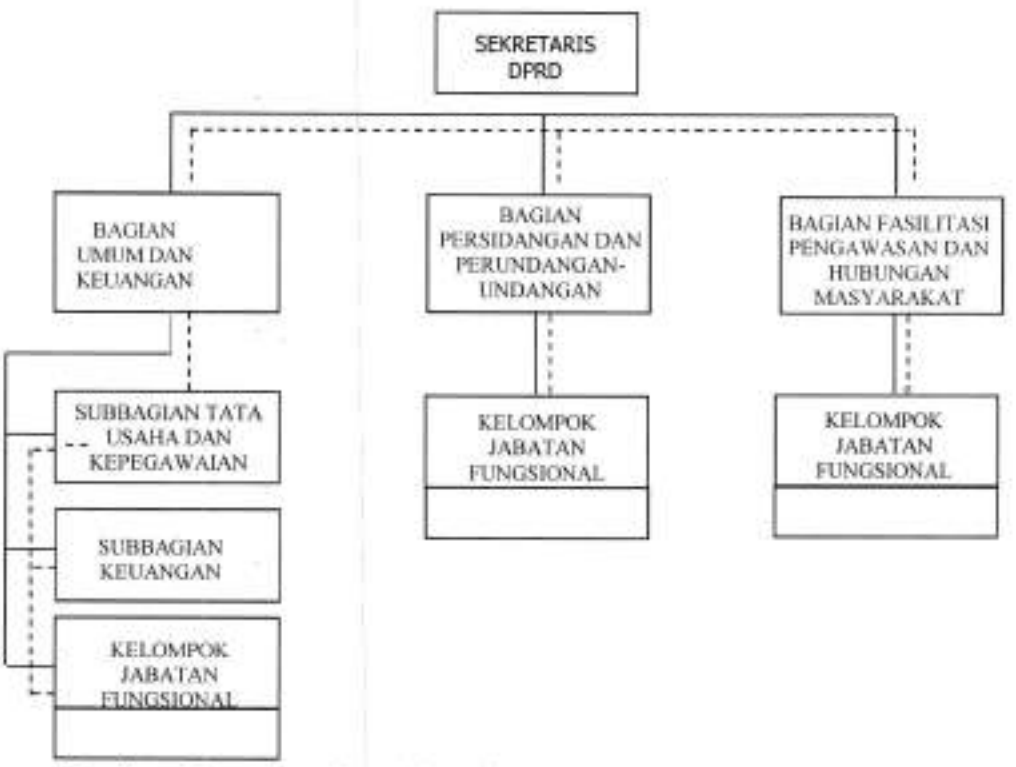

Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 40 Tahun 2023

Keterangan

---------- : Garis Koordinasi

——— : Garis Komando

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan fungsi Sekretariat DPRD adalah penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, penyediaan dan pengoordmasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang maka uraian tugas jabatan struktural pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

A. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Mengarahkan penyusunan dokumen perencanaan Sekretariat DPRD yang meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan organisasi, perencanaan partisipasif dan perencanaan yang lebih tinggi guna ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Merumuskan kebijakan kesekretariatan DPRD sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan kesekretariatan DPRD meliputi administrasi kesekretariatan, perencanaan dan keuangan, rapat–rapat, penyediaan tenaga ahli dan dukungan lain terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
4. Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi kesekretariatan DPRD sesuai dengan kebutuhan informasi publik;
5. Mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kesekretariatan DPRD sesuai dengan unsur SPIP;
6. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan DPRD sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
7. Merumuskan inovasi daerah penyelenggaraan kesekretariatan DPRD melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaaatan teknologi;
8. Merumuskan laporan kesekretariatan DPRD berdasarkan data

https://jdih.pemalangkab.go.id

dan analisa sebagai informasi dan pertanggunggjawaban kepada Bupati; dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

B. Kepala Bagian Umum dan Keuangan

Kepala Bagian Umum dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi;
2. Menyusun rancangan kebijakan Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi;
3. Merumuskan kebijakan teknis di bidang administrasi kesekretariatan DPRD;
4. Menyelenggarakan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
5. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian Setwan;
6. Menyelenggarakan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
7. Menyelenggarakan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;
8. Menyelenggarakan kegiatan fasilitasi kunjungan tamu dan fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD;
9. Menyelenggarakan kegiatan keprotokolan pimpinan dan anggota DPRD;
10. Menyelenggarakan kegiatan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD;
11. Menyelenggarakan kegiatan layanan administrasi DPRD;
12. Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan kebutuhan informasi publik;
13. Mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kesekretariatan DPRD sesuai dengan unsur SPIP;
14. Menyusun konsep inovasi Bagian Umum dan Keuangan;
15. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bagian Umum dan Keuangan;
16. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Umum dan Keuangan;
17. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bagian Umum dan Keuangan;
18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

C. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian

https://jdih.pemalangkab.go.id

1. Melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang meliputi pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya; pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian; serta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
2. Melaksanakan kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang meliputi penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor; penyediaan peralatan rumah tangga; penyediaan bahan logistik kantor; penyediaan barang cetakan dan penggandaan; penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi pada Setwan; serta penatausahaan arsip dinamis pada Setwan;
3. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang meliputi pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan; pengadaan mebel; serta pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
4. Melaksanakan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang meliputi penyediaan jasa surat menyurat; penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan lisrik; serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
5. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang meliputi penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan; penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan; pemeliharaan mebel; pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya; serta pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
6. Melaksanakan kegiatan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang meliputi penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD, serta pelaksanaan Medical Check Up DPRD;
7. Melaksanakan kegiatan layanan administrasi DPRD yang meliputi penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD; fasilitasi fraksi DPRD; fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD; serta penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
8. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan informasi publik;
9. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kesekretariatan DPRD sesuai dengan unsur SPIP;
10. Menyusun konsep inovasi pada Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;

https://jdih.pemalangkab.go.id

12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

D. Kepala Subbagian Keuangan

1. Melaksanakan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang meliputi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah; koordinasi dan penyusunan dokumen RKA, DPA dan perubahan RKA, perubahan DPA pada Setwan; koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; serta evaluasi kinerja perangkat daerah;
2. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang meliputi penyediaan gaji dan tunjangan ASN; pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD; koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD; serta penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
3. Melaksanakan kegiatan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang meliputi penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
4. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja DPRD;
5. Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan;
6. Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah;
7. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Subbagian Keuangan sesuai dengan kebutuhan informasi publik;Menyusun konsep inovasi pada Subbagian Keuangan;
8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Keuangan;
9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Keuangan;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

E. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan program dan kegiatan Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
2. Menyusun rancangan kebijakan Bagian Persidangan dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Perundang-Undangan;

3. Merumuskan kebijakan teknis di bidang legislasi dan penganggaran;
4. Menyelenggarakan kegiatan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD yang meliputi penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah, pembahasan rancangan peraturan daerah, penyelenggaraan kajian perundang-undangan, fasilitasi penyusunan penjelasan/ keterangan dan/ atau naskah akademik, dan penyusunan tata tertib DPRD;
5. Menyelenggarakan kegiatan fasilitasi tugas DPRD yang meliputi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, penyusunan laporan kinerja DPRD, fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah dan fasilitasi pelaksanaan tugas pimpinan DPRD.
6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
7. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

F. Kepala Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat

Kepala Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan program dan kegiatan Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat;
2. Menyusun rancangan kebijakan Bagian Fasilitasi Pengawasan Hubungan Masyakarat;
3. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan hubungan masyarakat;
4. Menyelenggarakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum, pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur, pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat, pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian, pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam, pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, pengawasan penggunaan anggaran, dan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah;
5. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas DPRD yang meliputi orientasi DPRD, pendalaman DPRD, publikasi dan dokumentasi Dewan, penyediaan kelompok pakar dan tim ahli, penyediaan tenaga ahli fraksi, penyelenggaraan hubungan masyarakat, serta penyusunan program kerja DPRD;

https://jdih.pemalangkab.go.id

6. Menyelenggarakan kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang meliputi kunjungan kerja dalam daerah, penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD, dan pelaksanaan reses
7. Menyelenggarakan kegiatan penyusunan bahan komunikasi dan publikasi dalam program pembahasan kerja sama daerah;
8. Menyelenggarakan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerja sama daerah;
9. Menyusun konsep inovasi Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat;
10. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat;
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.2 Sumber daya

Sumber daya Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang yang meliputi sumber daya manusia/kepegawaian dan sarana prasarana sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

a. Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Jumlah pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dalam memberikan pelayanan administrasi dan dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.2.a
Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang

No	Uraian	Golongan								Jumlah	
		I		II		III		IV			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Sekwan	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
2	Kabag	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2
3	Kasubag	-	-	-	-	1	-		1	1	1
4	JFT	-	-	2	-	3	4	-	1	5	5
5	JFU	-	-	15	2	8	3	-	-	23	5
6	Non ASN	26	12	-	-	-	-	-	-	26	12
Jumlah		26	12	17	2	12	7	2	4	57	25

Sumber : Sekretariat DPRD, Mei 2025

Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang berjumlah 82 orang, meliputi 57 orang laki-laki dan 25 orang perempuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai laki-laki pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang lebih banyak dibanding pegawai perempuan yaitu sebesar 69,51%. Selanjutnya jumlah pegawai

https://jdih.pemalangkab.go.id

berdasar golongan, meliputi non ASN/setara golongan I sebanyak 38 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 26 orang dan perempuan sebanyak 12 orang, golongan II sebanyak 18 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 17 orang dan perempuan sebanyak 2 orang, golongan III sebanyak 19 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 12 orang dan perempuan sebanyak 7 orang serta golongan IV sebanyak 6 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 2 orang dan perempuan sebanyak 4 orang , sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan golongan pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang didominasi oleh pegawai Non ASN/setara golongan I sebanyak 46,34%. Pegawai non ASN tersebut direkrut untuk membantu pelaksanaan tugas anggota DPRD dan Sekretariat DPRD yang terdiri dari tenaga ahli fraksi, tenaga administrasi, dan pengemudi. Sedangkan jika dilihat berdasar pegawai ASN, didominasi oleh pegawai bergolongan III yaitu sebanyak 47,72 %.

Tabel 2.1.2.b
Data Pegawai Berdasar Diklat Kepemimpinan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Diklatpim II	-	-	-
2	Diklatpim III	3	2	1
3	Diklatpim IV	3	1	2
4	ADUM	-	-	-
5	SEPADA	-	-	-
6	Struktural yang belum diklat	2	1	1
Jumlah		8	4	4

Sumber : Sekretariat DPRD, Mei 2025

Jumlah pegawai berdasarkan diklat kepemimpinan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, yaitu belum ada yang mengikuti Diklatpim II, 3 orang sudah mengikuti Diklatpim III, 3 orang sudah mengikuti Diklatpim IV dan 2 orang belum mengikuti diklat kepemimpinan, hal ini disebabkan menunggu ketersediaan alokasi dari BKD Kabupaten Pemalang.

Tabel 2.1.2.c
Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pasca Sarjana (S2)	6	2	4
2	Sarjana (S1)	22	10	12
3	Diploma	8	4	4
4	SLTA/paket C	42	37	5
5	SLTP/paket B	3	3	0
6	SD	1	1	0
Jumlah		82	57	25

Sumber : Sekretariat DPRD, Mei 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

Jumlah pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang berdasar tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S2) sebanyak 6 orang, Sarjana (S1) sebanyak 22 orang, Diploma sebanyak 8 orang, SLTA/Kejar Paket C sebanyak 42 orang, SLTP/Kejar Paket B sebanyak 3 orang dan SD sebanyak 1 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dominan berpendidikan SLTA/Paket C yaitu sebanyak 51,21 %.

Tabel 2.1.2.d
Data Pegawai Berdasar Tingkat Eselon

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	IIA	-	-	-
2	IIB	1	1	-
3	IIIA	3	1	2
4	IIIB	-	-	-
5	IVA	2	1	1
6	IVB	-	-	-
Jumlah		6	3	3

Sumber : Sekretariat DPRD, Mei 2025

Jumlah pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang berdasarkan tingkat eselon, yaitu Eselon IIA sebanyak - orang, IIB sebanyak 1 orang, IIIA sebanyak 3 orang, IIIB sebanyak - orang, IVA sebanyak 2 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang berdasarkan tingkat eselon terdapat keseimbangan antara Pejabat Laki-laki dan Pejabat Perempuan.

Untuk meningkatkan kapasitas SDM yang ada, Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang telah melaksanakan kegiatan pengembangan SDM yang tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.1.2.e
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran Tahun ke			Realisasi Tahun ke			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Pelaksanaan ke		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025 (TW II)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									

https://jdih.pemalangkab.go.id

	Sub Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	91.620.000	50.000.000	40.921.000	91.314.000	47.782.000	0	99,67	95,56	0
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungs i DPRD Kegiatan Pengingkatan Kapasitas DPRD									
	Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	2.384.352.200	2.348.403.800	1.886.914.500	2.365.179.803	2.022.832.921	957.796.477	99,20	86,14	50,76
	SubKegiatan Orientasi DPRD	0	441.162.000	0	0	410.112.598	0	0	92,96	0

Anggaran dan realisasi pengembangan sumber daya manusia mengalami fluktuatif, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Sekretariat DPRD. Ada 3 (tiga) sub kegiatan pengembangan sumber daya manusia, (1) sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan fokus ASN; (2) Sub kegiatan Pendalaman Tugas DPRD; dan (3) Sub kegiatan Orientasi DPRD dengan fokus anggota DPRD

b. Sarana dan Prasarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.2.f
Inventaris Aset Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang

No	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Jumlah Harga (Rp)
					Baik	Sedang	Rusak	
1	01		Tanah					
		01	Tanah	2	Baik			5.032.500.000
			Jumlah KIB A					5.032.500.000
2	01		Peralatan dan Mesin					
		02	Alat-alat Besar	4	Baik			197.198.000
		03	Alat-alat Angkutan	49	Baik			7.671.512.723
		04	Alat Bengkel dan Alat Ukur			Sedang		-
		05	Alat Pertanian	6		Sedang		6.605.000
		06	Alat Kantor & Rumah Tangga	1.751	Baik			4.524.262.753
		07	Alat Studia & Alat Komunikasi	178	Baik			1.183.207.350
		08	Alat-alat Kedokteran	2		Sedang		16.425.000
		09	Alat Laboratorium	3		Sedang		49.675.000
		10	Alat-alat persenjataan/keamanan					-

https://jdih.pemalangkab.go.id

			Jumlah KIB B					15.447.431.426
3	03		Gedung dan Bangunan					
		11	Bangunan Gedung	1	Baik			3.801.299.893
		12	Monumen					-
			Jumlah KIB C					3.801.299.893
4	04		Jalan, Irigasi dan Jaringan					
		13	Jalan & Jembatan					-
		14	Bangunan Air/Irigasi					-
		15	Instalasi					-
		16	Jaringan	1	Baik			295.146.125
			Jumlah KIB D					295.146.125
5	05		Aset Tetap Lainnya					
		17	Buku dan Perpustakaan	4.383	Baik			350.428.670
		18	Barang Bercorak Kebudayaan	88	Baik			42.005.000
		19	Hewan, Ternak dan Tanaman	32	Baik			6.512.000
			Jumlah KIB E					398.945.670
6	06		Konstruksi dalam Pengerjaan					
			Jumlah KIB F					-
			Jumlah Total					**24.975.323.114**

Sumber : Kartu Inventaris Barang (KIB) Sekretariat DPRD, Mei 2025

Dari aset yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang secara keseluruhan dalam kondisi baik sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1.3 Kinerja Pelayanan

Gambaran kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.3.a
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Pemalang Tahun 2021–2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Indeks kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	Nilai	78,84	80,14	81,24	84,87
2.	Cakupan layanan Sekretariat DPRD	%	-	65,81	77,52	79,52
3.	Nilai SAKIP	Nilai	45,20	54,15	58,60	60,62
4.	Persentase dukungan layanan kepada DPRD	%	-	94,56	95,74	96,14
5.	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi pokok DPRD yang tersedia	%	68,00	67,75	71,75	75,38
6.	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi lain DPRD yang tersedia	%	0	62,58	64,80	68,11
7.	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	%	32	32	32	30

Tabel 2.1.3.b
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Indeks kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	Nilai	78,84	80,14	81,24	84,87
2.	Cakupan layanan Sekretariat DPRD	%	-	65,81	77,52	79,52
3.	IKM	Nilai	78,84	80,14	81,24	84,87
4.	SAKIP	Nilai	45,20	54,15	58,60	60,62
5.	Persentase peraturan daerah dan DPRD yang dibahas	%	72,73	100	70	66,67
6.	Persentase dokumen daerah yang dibahas	%	100	100	100	100
7.	Persentase anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas	%	100	100	100	88,67
8.	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	%	32	32	32	30

Indeks kepuasan DPRD didapat dari hasil survei kepada anggota DPRD Kabupaten Pemalang terhadap layanan Sekretariat DPRD. Selama kurun waktu tahun 2021-2024 capaian indikator ini terus meningkat, yaitu sebesar 78,84 pada tahun 2021 menjadi sebesar 84,87 pada tahun 2024. Capaian tersebut berada pada kategori baik (antara rentang 76,61-88-30). Pelayanan kepada DPRD harus terus ditingkatkan agar nilai kepuasan terhadap layanan terus meningkat.

Layanan Sekretariat DPRD mencakup Persentase peraturan daerah dan DPRD yang dibahas, Persentase dokumen daerah yang dibahas dan Persentase anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas. Capaian indikator ini selama kurun waktu tahun 2021- 2024 mengalami peningkatan, yaitu sebesar 65,81% pada tahun 2022 hingga menjadi sebesar 79,527% pada tahun 2024.

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) dari hasil survei kepada masyarakt pengguna layanan terhadap layanan Sekretariat DPRD. Selama kurun waktu tahun 2021-2024 capaian indikator ini terus meningkat, yaitu sebesar 78,84 pada tahun 2021 menjadi sebesar 84,87 pada tahun 2024. Capaian tersebut berada pada kategori baik (antara rentang 76,61-88-30). Pelayanan kepada DPRD harus terus ditingkatkan agar nilai kepuasan terhadap layanan terus meningkat.

Nilai SAKIP diperoleh berdasarkan penilaian dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang. capaian indikator ini terus meningkat, yaitu sebesar 45,20 pada tahun 2021 menjadi sebesar 60,62 pada tahun 2024. Hal ini disebabkan adanya upaya perbaikan secara maksimal (termasuk yang menjadi rekomendasi Tim) yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang.

Selanjutnya Persentase peraturan daerah dan DPRD yang

https://jdih.pemalangkab.go.id

dibahas adalah layanan dalam pembentukan Peraturan Daerah dan peraturan DPRD, pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD serta fasilitasi tugas DPRD. Capaian indikator ini selama kurun waktu tahun 2021-2024 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang relatif signifikan yaitu sebesar 27,27. Namun pada tahun 2021, 2023 dan 2024 mengalami penurunan, yaitu rata-rata sebesar 2,67.

Persentase dokumen daerah yang dibahas adalah layanan dalam pembahasan kebijakan anggaran, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembahasan kerjasama daerah. Capaian indikator ini selama kurun waktu tahun 2021-2024 yaitu sebesar 100%.

Sedangkan anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas adalah layanan dalam peningkatan kapasitas DPRD, serta penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat. Capaian indikator ini selama kurun waktu tahun 2021-2023 yaitu sebesar 100%, namun pada tahun 2024 capaian sebesar 88,67% sehingga dapat dikatakan mengalami penurunan sebesar 11,35%.

Kegiatan pembentukan Perda dan peraturan DPRD yang difasilitasi Sekretariat DPRD meliputi : penyusunan dan pembahasan program pembentukan Perda, pembahasan Raperda, penyelenggaraan kajian perundang-undangan, fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan penyusunan tata tertib DPRD. Raperda yang dibahas dapat berasal dari eksekutif maupun inistiatif dari legislatif.

Kode etik DPRD adalah suatu ketentuan yang mengatur sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan yang ditetapkan dalam pelaksanaan wewenang, tugas dan kewajibannya sebagai anggota DPRD. Kode etik DPRD ditetapkan dengan Peraturan DPRD.

Fasilitasi tugas DPRD oleh Sekretariat DPRD meliputi : koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, penyusunan laporan kinerja DPRD, fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah DPRD dan fasilitasi tugas pimpinan DPRD.

Salah satu tugas DPRD adalah membahas rencana kerjasama daerah yang akan dijalin oleh Pemerintah Daerah. Kerjasama daerah dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari DPRD. Namun, selama kurun waktu tahun 2021-2024 tugas ini belum dilaksanakan sehingga capaian indikator ini sebesar 0%.

Pembahasan kebijakan anggaran yang difasilitasi Sekretariat DPRD meliputi : pembahasan KUA PPAS, pembahasan perubahan KUA PPAS, pembahasan APBD, pembahasan APBD perubahan, pembahasan laporan semesteran dan pembahasan pertanggungjawaban APBD.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sekretariat DPRD meliputi : pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum, pengawasan urusan pemerintahan bidang infratruktur, pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat, pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian, pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam, pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK, pengawasan penggunaan anggaran dan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati.

Peningkatan kapasitas DPRD yang difasilitasi Sekretariat DPRD meliputi : orientasi DPRD, bimbingan teknis DPRD, penyediaan kelompok pakar dan tim ahli, penyediaan tenaga ahli fraksi, penyelenggaraan hubungan masyarakat (kegiatan audiensi dengan masyarakat), penyusunan program kerja DPRD serta publikasi dan dokumentasi Dewan. Orientasi DPRD dan bimbingan teknis DPRD dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas DPRD terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok pakar dan tim ahli dimaksudkan untuk membantu DPRD terkait kajian terkait peraturan peraturan/legal opinion dan apabila terdapat kasus hukum yang melibatkan anggota DPRD. Tenaga ahli fraksi dimaksudkan untuk membantu tugas dan kegiatan fraksi.

Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang difasilitasi Sekretariat DPRD meliputi : kunjungan kerja dalam daerah, penyusunan pokok-pokok DPRD dan pelaksanaan reses. Penyelenggaraan hubungan masyarakat, kunjungan kerja dalam daerah dan reses dilakukan untuk menyerap dan menghimpun aspirasi dari masyarakat, yang selanjutnya menjadi bahan dalam pelaksanaan tugas pokok DPRD yaitu membentuk Perda, membahas anggaran dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, DPR telah mengamanatkan kuota 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik. Selanjutnya partai politik mencalonkan minimal 30% perempuan sebagai calon anggota legislatif dan menempatkan minimal satu caleg perempuan di antara tiga nama dalam daftar calon. Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Pemalang selama kurun waktu tahun 2021-2024 mengalami penurunan yaitu sebesar 32% pada tahun 2021 dan menjadi sebesar 30% pada tahun 2024.

2.1.4 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran layanan perangkat daerah adalah pihak yang secara langsung menerima manfaat dari layanan yang diberikan oleh perangkat daerah tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Mereka adalah individu, kelompok, atau organisasi yang

https://jdih.pemalangkab.go.id

menjadi target dari program, kegiatan, dan kebijakan yang dijalankan oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Yang menjadi kelompok sasaran layanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang yaitu Pimpinan dna Anggota DPRD Kabupaten Pemalang.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah

Mitra Perangkat Daerah merupakan Pihak-pihak yang bekerja sama dengan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Mitra ini bisa berupa instansi lain dalam pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dunia usaha, atau bahkan masyarakat sipil secara langsung.

Mitra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang antara lain Perangkat Daerah se Kabupaten Pemalang, Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang.

2.1.6 Dukungan BUMD

Dukungan BUMD dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah mengacu pada keterlibatan dan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mencapai tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra. BUMD dapat berperan sebagai sumber daya ekonomi, penyedia jasa, dan mitra strategis bagi pemerintah daerah dalam berbagai sektor pembangunan.

Dalam pencapaian tujuan dan sasarannya, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang tidak melibatkan BUMD secara langsung.

2.1.7 Kerjasama Daerah

Kerjasama Daerah Perangkat Daerah merujuk pada upaya bersama antar daerah, atau antara daerah dengan pihak ketiga (seperti badan usaha, organisasi kemasyarakatan, atau pemerintahan daerah di luar negeri), yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta saling menguntungkan.

Dalam pencapaian tujuan dan sasarannya, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang tidak melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam konteks upaya bersama antar daerah.

Realisasi program, kegiatan dan sub-kegiatan dari tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Anggaran dan Realisasi Tahun 2021-2024

No	Uraian	Anggaran pada Tahun 2021-2024				Realisasi Anggaran pada Tahun 2021-2024				Rasio ant
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	39.581.445.200	40.639.998.600	39.656.943.320	41.013.481.050	38.287.767.893	39.640.149.296	38.784.891.423	39.576.309.283	96,73
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.169.700	129.739.500	78.085.755	37.725.000	102.203.400	105.828.550	71.640.800	33.779.000	81,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.190.006.727	5.568.896.500	5.489.254.020	5.776.557.500	4.934.164.083	5.441.377.803	5.311.721.374	5.478.461.908	95,07
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	143.325.000	-	-	-	99.400.000	-	-	-	69,35
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	229.639.000	183.002.000	94.075.000	76.446.400	82.625.100	171.200.273	93.735.000	60.215.000	93,55
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.264.148.900	1.879.007.100	2.565.329.455	2.860.000.500	1.070.190.441	1.643.508.932	2.504.366.253	2.692.738.523	84,65
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	240.299.695	89.418.000	238.564.000	295.815.250	169.917.000	68.540.000	222.530.340	262.461.300	70,71
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	998.074.768	2.717.001.500	1.309.542.400	1.449.831.400	894.042.416	2.367.352.348	1.297.062.710	1.357.530.578	89,58
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	985.246.360	1.429.325.250	1.364.688.690	1.548.918.000	792.651.064	1.046.738.595	1.126.815.147	1.404.036.266	80,45
9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	27.926.170.000	27.905.888.000	28.149.961.000	-	27.860.457.316	27.613.484.350	27.531.975.041	-
10	Layanan Administrasi DPRD	-	717.438.750	611.516.000	818.226.000	-	670.954.383	543.535.449	755.111.667	-
	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	16.451.808.800	17.665.491.400	15.283.528.680	21.004.291.350	14.792.300.537	16.360.688.334	14.843.417.247	17.905.408.540	89,91
11	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	3.142.065.000	2.134.045.000	1.920.217.200	1.853.098.200	2.647.717.192	1.985.129.613	1.824.255.712	1.568.928.191	84,27
12	Pembahasan Kebijakan	101.600.000	70.485.000	61.487.000	157.785.000	69.820.000	62.646.100	58.178.080	143.967.050	68,72

https://jdih.pemalangkabgo.id

	Anggaran									
13	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	834.578.000	6.720.545.000	1.920.217.200	1.300.456.300	728.153.627	6.125.682.757	5.456.610.010	1.249.608.401	87,25
14	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.456.242.500	3.357.400.000	2.993.349.200	3.414.656.000	3.170.414.721	3.108.695.134	2.907.142.871	2.975.311.419	91,73
15	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.976.672.750	2.986.505.000	2.840.258.800	2.206.316.000	2.560.031.110	2.815.334.299	2.753.840.100	2.160.745.250	86,00
16	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	284.060.000	259.820.000	150.366.000	397.919.250	223.254.444	215.651.625	148.874.250	201.969.711	78,59
17	Fasilitasi Tugas DPRD	5.656.590.550	2.136.238.000	1.724.587.480	11.674.060.600	5.392.909.443	2.047.548.806	1.694.516.224	9.604.878.458	95,34
18	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	29.806.063.500	-	-	-	29.642.068.766	-	-	-	99,45
19	Layanan Administrasi DPRD	626.271.550	-	-	-	500.505.623	-	-	-	79,92
	Jumlah	56.033.254.000	58.305.490.000	54.940.472.000	62.017.772.400	53.080.068.430	56.000.837.630	53.620.189.487	57.481.717.823	94,73

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.2 Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan.

Pemetaan permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Pemalang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya capaian layanan kepada DPRD	Perlunya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Perlunya administrasi Keuangan DPRD yang dilaksanakan secara rutin
			Terdapat pakaian dinas dan atribut DPRD yang harus rutin disediakan
			Belum semua anggota DPRD mengikuti medical check up
		Belum optimalnya layanan administrasi DPRD	Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD
			Belum optimalnya fasilitasi fraksi DPRD
			Belum optimalnya fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD
			Perlunya penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD
2	Belum optimalnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Belum optimalnya pembahasan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang tepat waktu dan menjawab permasalahan yang ada di masyarakat	Perlunya penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
			Perlunya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
			Perlunya penyelenggaraan kajian Perundang-Undangan
			Perlunya fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik
			Perlunya penyusunan Tata Tertib DPRD
		Belum optimalnya pembahasan dokumen	Perlunya Pembahasan KUA dan PPAS

https://jdih.pemalangkab.go.id

daerah	
	Perlunya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
	Perlunya Pembahasan APBD
	Perlunya Pembahasan APBD Perubahan
	Perlunya Pembahasan Laporan Semester
	Perlunya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
	Belum optimalnya Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
	Belum optimalnya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
	Belum optimalnya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
	Belum optimalnya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
	Belum optimalnya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
	Belum optimalnya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
	Belum optimalnya Pengawasan Penggunaan Anggaran
	Belum optimalnya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
	Belum optimalnya Penyusunan Kode Etik

https://jdih.pemalangkab.go.id

			DPRD
			Belum optimalnya Pengawasan Kode Etik DPRD
			Belum optimalnya fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
			Belum optimalnya fasilitasi Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
			Belum optimalnya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
			Belum optimalnya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
		Perlunya pemahaman anggota DPRD terhadap regulasi-regulasi baru yang diterbitkan	Perlu diadakannya Orientasi DPRD
			Perlu diadakannya Bimbingan Teknis DPRD
			Perlunya Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
			Perlunya Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
			Perlunya penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
			Perlu disusunnya Program Kerja DPRD tiap tahun
			Belum optimalnya Publikasi dan Dokumentasi Dewan
		Belum optimalnya penyerapan aspirasi masyarakat	Belum optimalnya Kunjungan Kerja dalam Daerah
			Perlunya penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD
			Perlunya pelaksanaan reses sebagai wadah komunikasi dua arah antara DPRD dengan Konstituen di daerah pemilihan
3	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja	Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan PD
			Belum optimalnya penyusunan dokumen penganggaran PD

https://jdih.pemalangkab.go.id

			Belum optimalnya penyusunan laporan evaluasi kinerja PD
			Perlunya penyediaan gaji dan tunjangan ASN setiap Bulan
			Belum optimalnya penatausahaan dan pengujian verifikasi Keuangan
			Belum optimalnya penyusunan laporan keuangan PDBelum optimalnya penyusunan laporan keuangan PD
		Belum optimalnya layanan umum dan kepegawaian	Pentingnya menjaga keamanan BMD
			Belum tercukupinya sarpras kepegawaian
			Belum optimalnya administrasi kepegawaian
			Minimnya kegiatan peningkatan kapasitas
			Perlunya kecukupan kebutuhan kendaraan dinas
			Perlunya kecukupan kebutuhan peralatan dan mesin lainnya
			Perlunya kecukupan kebutuhan gedung dan sarpras gedung kantor
			Belum optimalnya pengelolaan suratmenyurat
			Perlunya pemenuhan kebutuhan listrik, PDAM yang harus dibayar
			Perlunya kendaraan dinas yang harus dipelihara
			Perlunya mebel yang harus dipelihara
			Perlunya peralatan dan mesin yang harus dipelihara
			Perlunya sarpras pendukung gedung kantor yang harus dipelihara

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan

https://jdih.pemalangkab.go.id

administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2029 disertai juga dengan penyusunan KLHS-RPJMD yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Terkait dengan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang tidak memiliki program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas. Hasil telaahan tersebut adalah Nihil, sebagaimana tabel sebagai berikut :

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
-	-	-	-	-	-	-

Hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, telaah visi misi dan program prioritas Bupati, yang meliputi potensi dan permasalahan yang dihadapi, dirumuskan isu strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang yaitu **"Perlunya optimalisasi pelayanan Sekretariat DPRD"**

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang ada serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah :

"Pemalang Bercahaya – Bersih, Cakap, Handal, dan Mulya"

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Bersih

Mengandung arti bahwa Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan

Cakap

Memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.

Handal

Dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya

Mulya

Dimaknai kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religious.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 8 (delapan) misi

https://jdih.pemalangkab.go.id

pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 atau yang sering disebut dengan **Rhapsodi,** sebagai berikut :

1. **Resik:** menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih;
2. **Hijau:** meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dannyaman melalui industry hijau yang berkelanjutan;
3. **Apik:** meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah;
4. **Peduli:** meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat;
5. **Silaturahmi:** meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera;
6. **Organisatoris:** meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi
7. **Digitalisasi:** memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar;
8. **Ikhlas:** menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan

Keterkaitan Visi dengan Misi adalah sebagai berikut:

Frase Bersih dan Handal dalam Visi akan dicapai dengan **Misi 1 Resik**: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih; **Misi 6 Organisatoris**: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi dan **Misi 7 Digitalisasi**: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar

Frase Cakap dalam Visi akan dicapai dengan **Misi 2 Hijau**: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan; **Misi 3 Apik**: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah dan **Misi 4 Peduli**: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat.

Frase MULYA dalam Visi akan dicapai dengan **Misi 5 Silaturahmi**: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera dan **Misi 8 Ikhlas**: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan.

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 tersebut ditetapkan 12 (dua belas) program unggulan, yaitu :

1. Seragam sekolah dan LKS gratis
2. Jalan halus merata
3. Revitalisasi penyediaan air bersih dari hulu sampai hilir
4. Penyediaan lapangan kerja melalui program padat karya
5. Bantuan modal usaha untuk UMKM
6. WIFI gratis tiap desa
7. Satu ambulance, satu desa

https://jdih.pemalangkab.go.id

8. Jaminan ketersediaan bibit unggul dan pupuk murah
9. Bantuan kendaraan operasional pondok pesantren
10. Insentif untuk guru honorer, TPQ, Madin dan Marbot
11. Santunan kematian Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)
12. Pembukaan Pintu Tol Sewaka

Berikut ini keterkaitan Visi, Misi dan Fokus Kerja dalam pembangunan 2025-2029 :

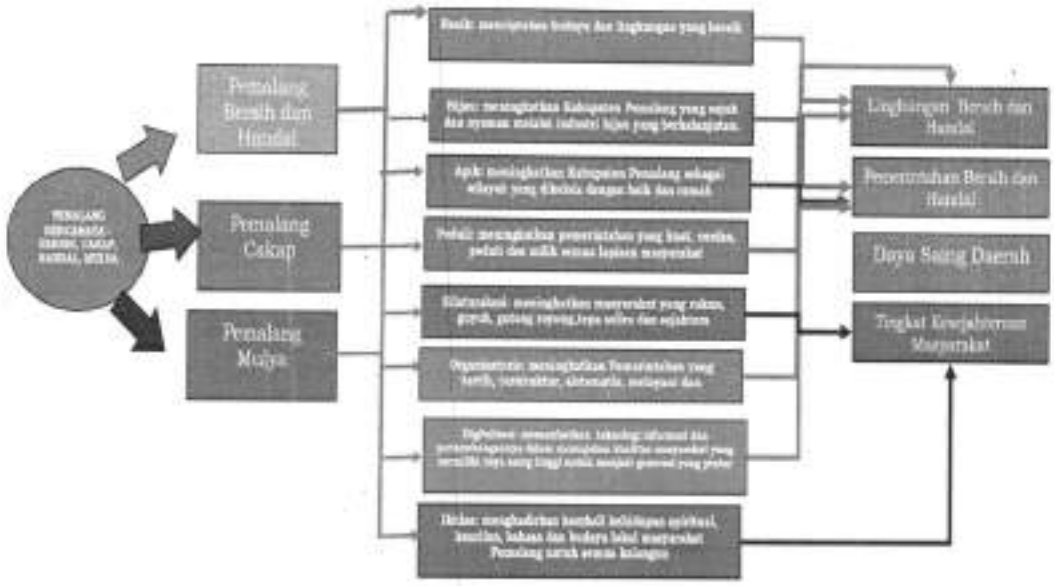

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang tersebut, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang mendukung visi misi kesatu yaitu : "**Bersih dan Handal"** dalam Visi akan dicapai dengan **Misi 1 Resik**: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih; **Misi 6 Organisatoris**: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi, yang akan dicapai melalui tujuan daerah berupa meningkatkan reformasi birokrasi bersih, transparan, dan akuntabel dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Serta sasaran daerah berupa meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa visi, misi, program RPJMD 2025-2029 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Pemalang dalam 5 (lima) tahun ke depan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan

https://jdih.pemalangkab.go.id

pemerintahan yang bersih dan mampu bersaing, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan komprehensif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan administrasi dan dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang secara proaktif berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan pelayanan publik yang prima.

Mendasarkan hal tersebut, tujuan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang 2025-2029 adalah "Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD" yang diukur dengan indikator "Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD" yang merupakan hasil survei kepuasan DPRD.

Tujuan tersebut akan diwujudkan melalui pencapaian sasaran sebagai berikut: :

1. "Meningkatnya kualitas pelayananan Sekretariat DPRD" yang diukur dengan indikator "Cakupan layanan Sekretariat DPRD"
2. Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator "IKM" dan "Nilai SAKIP OPD"

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian sasaran dalam Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang sebanyak 2 (dua) indikator.

Indikator pada masing-masing sasaran adalah pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2025- 2029

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1.	Meningkatnya kualitas pelayananan Sekretariat DPRD	1.	Cakupan layanan Sekretariat DPRD
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah	2.	IKM
		3.	Nilai SAKIP OPD

Berdasarkan uraian di atas kita dapat melihat penjabaran sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja organisasi secara vertikal dan horizontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam kinerja

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dalam Cascading visi, misi daerah ke perangkat daerah sebagai berikut:

Bagan 3.1 Cascading Visi dan Misi Daerah, Tujuan dan Sasaran Daerah, Tujuan dan Sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

VISI DAERAH	**Pemalang Bercahaya – Bersih, Cakap, Handal, dan Mulya**	
MISI	Resik / Hijau / Apik / silaturahmi / Organisatoris / Digitalisasi / Ikhlas	
FRASE VISI	Bersih dan Handal	
TUJUAN DAERAH	Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	
SASARAN DAERAH	Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik	
TUJUAN OPD	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	
SASARAN OPD	1. Meningkatnya kualitas pelayananan Sekretariat DPRD 2. Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah	
PROGRAM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

TABEL 3.2
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya birokrasi yang akuntabel, efektif, dan	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi	Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	Cakupan layanan Sekretariat DPRD	80,52	81,52	82,52	83,52	84,52	85,52	

https://jdih.pemalangkab.go.id

efisien, dengan pelayanan publik yang baik	DPRD	Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah	IKM (%)	84,97	85,07	85,17	85,27	85,37	85,47	
			Nilai SAKIP OPD	61,62	62,62	63,62	64,62	65,62	66,62	

4.3 Strategi

Strategi Renstra adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan Langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Dalam penentuan strategi, Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang tidak terlepas dari strategi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik. Sasaran ini memiliki strategi peningkatan akuntabilitas pembangunan melalui peningkatan kualitas perencanaan, kinerja dan pelaporan.

Strategi RPJMD Kabupaten Pemalang 2025-2029 dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut:

Tahun 2026 Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing Sumberdaya manusia. Prioritas pembangunan adalah :

1. Memperkuat pertanian sebagai penyangga pangan Jawa Tengah,
2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan,
3. Penguatan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern.
4. Peningkatan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka mempercepat distribusi barang dan jasa.
5. Penyediaan lapangan kerja melalui program padat karya pada pengelolaan sumberdaya air dan ke PU an.
6. Mempertahanan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan pemberian insentif pada pemilik sawah melalui akses pupuk murah, bibit berkualitas dan pendampingan untuk pasca panen.
7. Penguatan koperasi merah putih yang mampu menjadi mitra petani.
8. Mendorong BUMDES dan BUMDEsma dalam penguatan kemandirian pangan.
9. Penguatan cadangan pangan dan penguatan keaneragaman bahan serta keamanan pangan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

10. Peningkatan kondusivitas wilayah yang akan mendukung iklim investasi dan perekonomian daerah.
11. Peningkatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana dengan kolaborasi pembentukan dan penguatan desa tangguh bencana.
12. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam melakukan pilah sampah dan pengelolaan kontrol landfiil TPA. Peningkatan pilah sampah pada semua sektor baik publik maupun swasta, penguatan bank sampah.
13. Peningkatan pengelolaan pendidikan yang mudah diakses masyarakat, persiapan sekolah rakyat, sekolah garuda, memperkuat sekolah inklusi dan kesetaraan dalam mendorong harapan lama sekolah dan rata rata lama sekolah. Penyediaan lokasi untuk pembangunan SMA/SMK dalam rangka mengurangi *blankspot (*wilayah tanpa SMA/SMK).
14. Peningkatan perilaku hidup sehat dan kualitas pelayanan kesehatan. Pelaksanaan Program Makan Bergizi pada anak sekolah, pemeriksaan kesehatan untuk melakukan deteksi dini pada penyakit tidak menular. Penyediaan ambulan gratis dan melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Randudongkal. Peningkatan pembangunan keluarga yang berkualitas dengan tingkat kelahiran yang direncanakan, usia perkawinan yang semakin matang.
15. Peningkatan budaya masyarakat yang berkolaborasi dengan pariwisata mampu mendorong perekonomian daerah. Penguatan dan pemberdayaan kelompok kelompok seni dan budaya serta pelestarian cagar budaya.
16. Peningkatan perlindungan sosial pada PPKS terutama pada PPKS yang terlantar, penguatan rumah singgah dalam penanganan PPKS. Penguatan data penduduk miskin sehingga mampu menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan dalam penanganan kemiskinan.
17. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang mampu menciptakan *Good and Clean Government,* peningkatan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi dan berbasis teknologi, peningkatan profesionalisme ASN, peningkatan budaya kerja.

Tahun 2027 Mengembangkan potensi perekonomian melalui pembangunan pariwisata terintegrasi, industri bidang pertanian dan perikanan serta pengembangan UMKM. Prioritas tahun 2027 adalah :

1. Pengembangan pembangunan pariwisata, pengembangan sport tourism terutama pada wilayah Pantai Widuri, penguatan desa wisata, peningkatan promosi destinasi wisata, sinergi event budaya dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata, peningkatan kualitas restaurant dan hotel serta pengembangan ekonomi kreatif
2. Memperkuat industrialisasi bidang pertanian dan perikanan pada produk unggulan daerah. Hilirisasi pertanian dan perikanan dari pengolahan bahan sampai barang jadi, pengembangan pengemasan dan branding serta pengembangan agrowisata dan minawisata.
3. Peningkatan pemanfaatan kawasan peruntukan industry dengan promosi investasi dan peningkatan kemudahan pelayanan perijinan, peningkatan sentra IKM.

https://jdih.pemalangkab.go.id

4. Peningkatan ketrampilan pemuda dalam kewirausahaan dan digitalisasi marketing untuk promosi produk unggulan termasuk pariwisata.
5. Peningkatan pendapatan masyarakat dengan mendorong jiwa kewirausahaan dan penguatan UMKM. Penguatan koperasi merah putih sebagai salah satu sumber pembiayaan UMKM dan pemasaran produk UMKM. Penguatan sumber pembiayaan syariah terutama pada koperasi merah putih dan digitalisasi pada semua sektor ekonomi
6. Peningkatan kualitas sarana distribusi pasar dengan membangun dan memperbaiki pasar.
7. Menciptakan kondusivitas wilayah yang mampu meningkatkan iklim investasi. Peningkatan peran forum kerukunan antar umat beragam dalam mencegah konflik antar umat beragama. Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah dengan melakukan penegakkan perda dan perkada.
8. Pengembangan infrastruktur dalam pengembangan potensi perekonomian daerah. Penguatan daya saing SDM dalam mendorong daya saing ekonomi. Penguatan industri hijau dan ekonomi sirkuler. Prioritas pengelolaan sampah dan limbah industry

Tahun 2028 Mempercepat pembangunan perkotaan dan perdesaan guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi dan modernisasi. Prioritas pada tahun 2028 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pembangunan perkotaan, penataan wialayah perkotaan, membangun area elola yang mendorong aktivitas masyarakat dan ekonomi masyarakat.
2. Memperkuat hilirisasi dan modernisasi. Meningkatkan pembangunan desa sebagai upaya pemerataan pembangunan. Penguatan digitalisasi pelayanan publik, mendorong Smart Village dalam menata desa.
3. Pengembangan kawasan perdesaan yang mampu mendorong pengembangan sektor unggulan. Penguatan tata kelola yang mampu mewujudkan penataan perkotaan dan perdesaan.
4. Penguatan BUMDES dan BUMDEsma dalam pengembangan perekonomian desa.
5. Peningkatan kapasitas apparat desa dalam mendorong pembangunan desa.
6. Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam penemuan energi terbarukan berdasarkan potensi desa (hydro, surya, panas bumi dan angin) dengan melakukan kolaborasi bersama Perguruan Tinggi.
7. Meningkatkan daya saing SDM kota dan desa dalam mempercepat pembangunan perkotaan dan perdesaan.

Tahun 2029 Mewujudkan daya saing daerah menuju Pemalang Bersih, Cakap, Handal dan Mulya (BERCAHAYA). Prioritas pada tahun 2029 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan 13 tahun dengan memantapkan kualitas pengolaan pendidikan, pemantapan kualitas sekolah kesetaraan, sekolah rakyat dan sekolah garuda. Guru yang semakin profesional dengan tingkat kesejahteraan.
2. Memantapkan kesehatan masyarakat mendorong perwujudan populasi bebas penyakit dan semakin kuatnya perilaku hidup sehat pada masyarakat.

https://jdih.pemalangkab.go.id

3. Pemantapan hilirisasi dan modernisasi produk unggulan daerah menuju produk potensi ekspor dengan tersedianya daya tamping air, energi yang cukup.
4. Semakin meluas jalan mantap, sumberdaya alam yang mampu mendorong ketahanan air dan pangan, semakin meluas kepemilikan rumah layak huni dan berkurangnya Kawasan Kumuh.
5. Mewujudkan *good and clean government*, pemantapan maturisasi SPIP, digitalisasi pelayanan publik.
6. Pemantapan Pemalang Resik yaitu lingkungan yang bersih dengan sampah yang telah terolah.

Tahun 2030 Terwujudnya pondasi transformasi menuju akselerasi transformasi untuk mencapai Pemalang MULYA. Tahun ini merupakan transisi pada periode I menuju periode II RPJPD. Berikut ini prioritas tahun 2030:

1. Perwujudan kualitas air, udara dan tutupan lahan menuju akselerasi transformasi lingkungan alam yang bersih, penurunan penggunaan produk yang mendorong gas rumah kaca.
2. Perwujudan kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik sebagai pondasi transformasi menuju akselerasi transformasi.
3. Perwujudan daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, destinasi wisata yang berdaya saing. Pemantapan ketersediaan pangan berbasis potensi lokal, pemantapan pertumbuhan kawasan perekonomian baru, pemantapan daya dukung energi, air dan pangan
4. Perwujudan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan pendidikan 13 tahun, sekolah inklusi dan literasi semakin meluas sebagai perwujudan pondasi transformasi. Perwujudan kualitas hidup sehat dengan perilaku hidup sehat, aktivitas fisik dan lingkungan yang sehat. Mewujudkan keluarga berkualitas dengan kebahagiaan dan ketenteraman. Penguatan budaya Pemalang dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
5. Perwujudan kualitas riset dan inovasi yang mendorong pembangunan Pemalang, peningkatan pemanfaatan tepat teknologi tepat guna sebagai dasar menuju akselerasi transformasi,
6. Perwujudan penurunan kesenjangan pendapatan masyarakat : dengan pembangunan desa yang merata dan berkualitas, kelembagaan desa yang mampu mendorong perekonomian desa yang berdaya saing, infrastruktur desa yang mantap, peningkatan pendapatan masyarakat miskin dengan ketrampilan berusaha yang mampu menjadikan sumber penghasilan, pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin, terpenuhinya pelayanan dan kebutuhan Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial.
7. Perwujudan penanganan pengangguran sebagai fondasi transformasi, terwujudnya kolaborasi dunia usaha, pemerintah, perguruan tinggi dalam mengurangi pengangguran, calon tenaga kerja yang memiliki kompetensi

https://jdih.pemalangkab.go.id

Mendasarkan pada strategi RPJMD Kabupaten Pemalang 2025-2029, maka strategi Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

TABEL 3.3
Strategi dan Arah Kebijakan
Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2025-2029

Visi	PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA		
Frasa Visi	Bersih dan Handal		
Misi	Resik dan Organisatoris		
Tujuan Daerah	Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel IK : IRB		
Sasaran Daerah	Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik. IK : Nilai SAKIP		
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah kebijakan
Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Meningkatkan kualitas pelayananan/ fasilitasi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Memberikan fasilitasi/pelayanan dalam pelaksanaan tugas DPRD
	Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik/ masyarakat dan akuntabilitas Perangkat Daerah	Melaksanakan pembinaan dan pendampingan dalam peningkatan kualitas layanan publik dan akuntabilitas Pernagkat Daerah

Aktivitas pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan penahapan yang selaras dengan penahapan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029. Adapun penahapan program prioritas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diarahkan sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.4 Penahapan pelaksanaan Program Prioritas
pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan *Good and Clean Government*	Meningkatkan efektivitas kebijakan penciptaan kondusivitas daerah dan peningkatan kerukunan masyarakat	Meningkatkan efektivitas pelaksanaan Sumber Daya Manusia	Mewujudkan *good and clean government* serta pelayanan publik	Meningkatkan efektifikas pelayanan publik yang baik

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029 :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
      b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
      c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
      d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
      e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
      f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
      g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
      b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
      c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
      d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
      e. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
   3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD;
      b. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
   4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
      b. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
      c. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
      d. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;

https://jdih.pemalangkab.go.id

e. Sub Kegiatan Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
   g. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu;
   h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
   i. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
   j. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   b. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   c. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar;
   d. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   e. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel;
   f. Sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
   g. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan;
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar;
   d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel;
   e. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

https://jdih.pemalangkab.go.id

f. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
g. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
h. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

9. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
   a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
   c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.
10. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD
   a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD;
   b. Sub Kegiatan Fasilitasi Fraksi DPRD;
   c. Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD;
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD.

B. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
   a. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
   b. Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
   c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan;
   d. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik;
   e. Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD.
2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran
   a. Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS;
   b. Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
   c. Sub Kegiatan Pembahasan APBD;
   d. Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan;
   e. Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester;
   f. Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.
3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
   a. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum;
   b. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;
   c. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
   d. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam;
   e. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;
   f. Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
   g. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran;

https://jdih.pemalangkab.go.id

h. Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
   a. Sub Kegiatan Orientasi DPRD;
   b. Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD;
   c. Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan;
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;
   e. Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
   f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat;
   g. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD.
5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
   a. Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah;
   b. Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
   c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses.
6. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
   a. Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD;
   b. Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD.
7. Kegiatan Pembahasan Kerjasana Daerah
   a. Sub Kegiatan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah;
   b. Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi.
8. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD
   a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
   b. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD;
   c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah;
   d. Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan selama periode tahun 2025 – 2029, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dalam menyusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan ini telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penjabaran rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2026-2030

Bidang Urusan/Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator outcome	Baseline tahun 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Penanggung jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sekretariat DPRD				71.160.450.400		72.111.036.097		72.111.036.097		72.111.036.097		72.111.036.097	
Tujuan : Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	84,87	85,07		85,17		85,27		85,37		85,47		
Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat DPRD	Cakupan layanan sekretariat DPRD	79,52	81,52		82,52		83,52		84,52		85,52		
Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah	IKM	84,87	85,07		85,17		85,27		85,37		85,47		
	Nilai SAKIP OPD	60,62	62,62		63,62		64,62		65,62		66,62		
Program Penunjang Urusan Pemerin-tahan Daerah Kabu-paten/Kota	Persentase doku-men perencana-an, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi	98,13	100	51.111.787.650	100	56.515.665.347	100	56.515.665.347	100	56.515.665.347	100	56.515.665.347	
	Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi	99,81	100		100		100		100		100		

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator outcome	Baseline tahun 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Penanggung jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi	99,81	100		100		100		100		100		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23.258.000		27.258.000		27.258.000		27.258.000		27.258.000	
Keluaran	Jumlah laporan/ dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi	9 dokumen	9 dokumen		9 dokumen		9 dokumen		9 dokumen		10 dokumen		
Hasil	Persentase laporan/dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator outcome	Baseline tahun 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Penanggung jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	5.290.000	2 dokumen	5.290.000	2 dokumen	5.290.000	2 dokumen	5.290.000	3 dokumen	5.290.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	2.371.000	1 dokumen	3.371.000	1 dokumen	3.371.000	1 dokumen	3.371.000	1 dokumen	3.371.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2 dokumen	2.239.000	2 dokumen	3.239.000	2 dokumen	3.239.000	2 dokumen	3.239.000	2 dokumen	3.239.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1.590.000	1 dokumen	2.590.000	1 dokumen	2.590.000	1 dokumen	2.590.000	1 dokumen	2.590.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	2.226.000	1 dokumen	3.226.000	1 dokumen	3.226.000	1 dokumen	3.226.000	1 dokumen	3.226.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator outcome	Baseline tahun 2024	Target dan pagu indikatif tahun										PD Penanggung jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyu-sunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 dokumen	3 dokumen	5.494.500	3 dokumen	5.494.500	3 dokumen	5.494.500	3 dokumen	5.494.500	3 dokumen	5.494.500	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	4 dokumen	4.047.500	4 dokumen	4.047.500	4 dokumen	4.047.500	4 dokumen	4.047.500	4 dokumen	4.047.500	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.477.112.500		6.481.112.500		6.481.112.500		6.481.112.500		6.481.112.500	
Keluaran	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	611 dokumen	681 dokumen		681 dokumen		681 dokumen		681 dokumen		681 dokumen		
Hasil	Persentase lapor-an/dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator outcome	Baseline tahun 2024	Target dan pagu indikatif tahun										PD Penanggung jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	574 orang / bulan	644 orang /bulan	6.466.655.000	644 orang /bulan	6.466.655.000	644 orang /bulan	6.466.655.000	644 orang /bulan	6.466.655.000	644 orang /bulan	6.466.655.000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	4.950.000	12 dokumen	4.950.000	12 dokumen	4.950.000	12 dokumen	4.950.000	12 dokumen	4.950.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	2.160.000	1 dokumen	4.160.000	1 dokumen	4.160.000	1 dokumen	4.160.000	1 dokumen	4.160.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD	12 dokumen	12 dokumen	3.347.500	12 dokumen	5.347.500	12 dokumen	5.347.500	12 dokumen	5.347.500	12 dokumen	5.347.500	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator outcome	Baseline tahun 2024	Target dan pagu indikatif tahun										PD Penanggung jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Keluaran	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi	-	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		
Hasil	Persentase dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah disusun sesuai regulasi	-	100%		100%		100%		100%		100%		
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1 laporan	1.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 laporan	1.000.000	1 laporan	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator outcome	Baseline tahun 2024	Target dan pagu indikatif tahun										PD Penanggung jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				83.815.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Keluaran	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	38 dokumen	38 dokumen		38 dokumen		38 dokumen		38 dokumen		38 dokumen		
Hasil	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	12 paket	12 paket	30.000.000	12 paket	30.000.000	12 paket	30.000.000	12 paket	30.000.000	12 paket	30.000.000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	1 dokumen	1.316.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	0 orang	1 orang	1.000.000	40 orang	10.000.000	40 orang	10.000.000	40 orang	10.000.000	40 orang	10.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator outcome	Baseline tahun 2024	Target dan pagu indikatif tahun										PD Penanggung jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 orang	1 orang	1.000.000	40 orang	10.000.000	40 orang	10.000.000	40 orang	10.000.000	40 orang	10.000.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bombingan teknis implementtasi Peraturan Per-UU-an	17 orang	17 orang	49.999.000	40 orang	50.000.000	40 orang	50.000.000	40 orang	50.000.000	40 orang	50.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.256.236.875		3.090.236.875		3.090.236.875		3.090.236.875		3.090.236.875	
Keluaran	Jumlah fasilitasi administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai regulasi	27.080 dokumen	27.080 dokumen		27.080 dokumen		27.080 dokumen		27.080 dokumen		27.080 dokumen		
Hasil	Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai regulasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12 Paket	49.998.550	12 Paket	49.998.550	12 Paket	49.998.550	12 Paket	49.998.550	12 Paket	49.998.550	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator outcome	Baseline tahun 2024	Target dan pagu indikatif tahun										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	12 paket	5.000.000	12 paket	5.000.000	12 paket	5.000.000	12 paket	5.000.000	12 paket	5.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket	12 Paket	28.682.500	12 Paket	28.682.500	12 Paket	28.682.500	12 Paket	28.682.500	12 Paket	28.682.500	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	1.593.799.825	12 Paket	2.093.799.825	12 Paket	1.593.799.825	12 Paket	1.593.799.825	12 Paket	1.593.799.825	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	12 Paket	99.247.000	12 Paket	199.247.000	12 Paket	99.247.000	12 Paket	99.247.000	12 Paket	99.247.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	27.612 dokumen	27.612 dokumen	147.330.000	27.612 dokumen	247.330.000	27.612 dokumen	147.330.000	27.612 dokumen	147.330.000	27.612 dokumen	147.330.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	12 laporan	25.000.000	12 laporan	25.000.000	12 laporan	25.000.000	12 laporan	25.000.000	12 laporan	25.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator outcome	Baseline tahun 2024	Target dan pagu indikatif tahun										PD Penanggung jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	300.415.000	12 laporan	300.415.000	12 laporan	300.415.000	12 laporan	300.415.000	12 laporan	300.415.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	5.764.000	12 dokumen	5.764.000	12 dokumen	25.764.000	12 dokumen	5.764.000	12 dokumen	5.764.000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- dokumen	12 dokumen	1.000.000	12 dokumen	1.000.000	12 dokumen	10.000.000	12 dokumen	1.000.000	12 dokumen	1.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.362.333.150		6.112.333.150		6.112.333.150		6.112.333.150		3.362.333.150	
Keluaran	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	44 unit	42 unit		44 unit		44 unit		44 unit		44 unit		

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator outcome	Baseline tahun 2024	Target dan pagu indikatif tahun										PD Penanggung jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	5 Unit	6 Unit	3.087.445.000		4.087.445.000		4.087.445.000		4.087.445.000		4.087.445.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	2 Unit	20.000.000	2 Unit	1.020.000.000	2 Unit	1.020.000.000	2 Unit	1.020.000.000	2 Unit	1.020.000.000	
Pengadaan Alat Berat	Jumlah unit alat alat besar yang disediakan	- Unit	2 Unit	10.000.000	2 Unit	10.000.000	2 Unit	10.000.000	2 Unit	10.000.000	2 Unit	10.000.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	- Unit	2 Unit	10.000.000	2 Unit	60.000.000	2 Unit	60.000.000	2 Unit	60.000.000	2 Unit	60.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	88 Unit	17 Unit	41.621.860	17 Unit	91.621.860	17 Unit	91.621.860	17 Unit	91.621.860	17 Unit	91.621.860	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator outcome	Baseline tahun 2024	Target dan pagu indikatif tahun										PD Penanggung jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Unit	1 Unit	50.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Unit	1 Unit	143.266.290	1 Unit	643.266.290	1 Unit	643.266.290	1 Unit	643.266.290	1 Unit	643.266.290	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.484.532.000		1.814.532.000		1.814.532.000		1.814.532.000		1.814.532.000	
Keluaran	Jumlah Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 laporan	36 dokumen		36 dokumen		36 dokumen		36 dokumen		36 dokumen		
Hasil	Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator outcome	Baseline tahun 2024	Target dan pagu indikatif tahun										PD Penanggung jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	12 laporan	21.698.000	12 laporan	51.698.000	12 laporan	21.698.000	12 laporan	21.698.000	12 laporan	21.698.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	775.950.000	12 laporan	875.950.000	12 laporan	775.950.000	12 laporan	775.950.000	12 laporan	775.950.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	- laporan	12 laporan	10.000.000	12 laporan	10.000.000	12 laporan	10.000.000	12 laporan	10.000.000	12 laporan	10.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	676.884.000	12 laporan	876.884.000	12 laporan	876.884.000	12 laporan	876.884.000	12 laporan	876.884.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	44 unit	44 unit	1.363.951.685	44 unit	1.777.840.745	44 unit	1.363.951.685	44 unit	1.363.951.685	44 unit	1.363.951.685	

Bidang Urusan/Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator outcome	Bas ta 20
1	2	
Keluaran	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah yang Dipelihara	44
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliha raan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendara an Dinas Operasio nal atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	44 U

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator outcome	Baseline tahun 2024	Target dan pagu indikatif tahun										PD Penanggung jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	- Unit	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	39.987.375	1 Unit	39.987.375	1 Unit	39.987.375	1 Unit	39.987.375	1 Unit	39.987.375	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit	12 Unit	379.687.000	12 Unit	379.687.000	12 Unit	379.687.000	12 Unit	379.687.000	12 Unit	379.687.000	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Tak Berwujud yang dipelihara	- Unit	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	12 Unit	100.000.000	3 Unit	513.889.060	3 Unit	513.889.060	3 Unit	513.889.060	3 Unit	513.889.060	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	12 Unit	113.889.060	3 Unit	113.889.060	3 Unit	113.889.060	3 Unit	113.889.060	3 Unit	113.889.060	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator outcome	Baseline tahun 2024	Target dan pagu indikatif tahun										PD Penanggung jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				35.458.247.000		35.458.247.000		35.458.247.000		35.458.247.000		35.458.247.000	
Keluaran	Jumlah ketersediaan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	853 dokumen	900 dokumen		900 dokumen		900 dokumen		900 dokumen		900 dokumen		
Hasil	Persentase ketersediaan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	691 Orang	50 Orang/ 14 Bulan	35.011.296.000	50 Orang/ 14 Bulan	35.664.599.637	50 Orang/ 14 Bulan	35.011.296.000	50 Orang/ 14 Bulan	35.011.296.000	50 Orang/ 14 Bulan	35.011.296.000	
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	131 paket	150 paket	371.896.000	150 paket	471.896.000	150 paket	371.896.000	150 paket	371.896.000	150 paket	371.896.000	
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	31 Orang	50 Orang	75.055.000	50 Orang	85.055.000	50 Orang	75.055.000	50 Orang	75.055.000	50 Orang	75.055.000	
Layanan Administrasi DPRD				610.801.440		870.801.440		870.801.440		870.801.440		870.801.440	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator outcome	Baseline tahun 2024	Target dan pagu indikatif tahun										PD Penanggung jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Keluaran	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi DPRD	21 dokumen	830.622.833	30 dokumen	830.622.833	30 dokumen	830.622.833	30 dokumen	830.622.833	30 dokumen	830.622.833	30 dokumen	
Hasil	Persentase ketersediaan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang tersedia	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD	4 dokumen	4 dokumen	16.147.000	4 dokumen	56.147.000	4 dokumen	56.147.000	4 dokumen	56.147.000	4 dokumen	56.147.000	
Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi Fraksi DPRD	1 laporan	12 laporan	10.495.000	12 laporan	20.495.000	12 laporan	20.495.000	12 laporan	20.495.000	12 laporan	20.495.000	
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	4 laporan	2 laporan	351.690.000	2 laporan	551.690.000	2 laporan	551.690.000	2 laporan	551.690.000	2 laporan	551.690.000	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan	12 paket	12 paket	232.469.440	12 paket	242.469.440	12 paket	242.469.440	12 paket	242.469.440	12 paket	242.469.440	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator outcome	Baseline tahun 2024	Target dan pagu indikatif tahun										PD Penanggung jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		20.018.662.750		20.048.662.750		15.595.370.750		15.595.370.750		15.595.370.750		15.595.370.750	
	Persentase Peraturan daerah dan DPRD yang dibahas	66,67%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase dokumen daerah yang dibahas, dan Anggota DPRD yang me-ngikuti peningkat-an kapasitas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas	88,67%	100%		100%		100%		100%		100%		
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				2.156.142.850		1.787.562.500		1.787.562.500		1.787.562.500		1.787.562.500	
Keluaran	Jumlah dokumen hasil Pembentuk an Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	20 dokumen	20 dokumen		20 dokumen	1.787.566.500	20 dokumen		20 dokumen		20 dokumen		

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator outcome	Baseline tahun 2024	Target dan pagu indikatif tahun										PD Penanggung jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Hasil	Persentase pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	92,31%	100%		100%		100%		100%		100%		
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan Peraturan Daerah	5 dokumen	7 dokumen	2.156.142.850	7 dokumen	806.142.850	7 dokumen	806.142.850	7 dokumen	806.142.850	7 dokumen	806.142.850	
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah	3 dokumen	7 dokumen	1.203.101.800	7 dokumen	703.101.800	7 dokumen	703.101.800	7 dokumen	703.101.800	7 dokumen	703.101.800	
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kajian Perundang-undangan	2 dokumen	2 dokumen	115.091.500	2 dokumen	115.091.500	2 dokumen	115.091.500	2 dokumen	115.091.500	2 dokumen	115.091.500	
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	2 dokumen	1 dokumen	225.941.500	1 dokumen	125.941.500	1 dokumen	125.941.500	1 dokumen	125.941.500	1 dokumen	125.941.500	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator outcome	Baseline tahun 2024	Target dan pagu indikatif tahun										PD Penanggung jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	0 dokumen	1 dokumen	57.288.850	1 dokumen	37.288.850	1 dokumen	37.288.850	1 dokumen	37.288.850	1 dokumen	37.288.850	
Pembahasan Kebijakan Anggaran				202.016.800		113.016.800		202.016.800		202.016.800		202.016.800	
Keluaran	Jumlah dokumen hasil pembahasan Kebijakan Anggaran	5 dokumen	5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		
Hasil	Persentase hasil pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	1 dokumen	29.050.000	1 dokumen	19.050.000	1 dokumen	29.050.000	1 dokumen	29.050.000	1 dokumen	29.050.000	
Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS Perubahan	1 dokumen	1 dokumen	29.050.000	1 dokumen	19.050.000	1 dokumen	29.050.000	1 dokumen	29.050.000	1 dokumen	29.050.000	
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	1 dokumen	37.185.400	1 dokumen	20.185.400	1 dokumen	40.185.400	1 dokumen	40.185.400	1 dokumen	40.185.400	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator outcome	Baseline tahun 2024	Target dan pagu indikatif tahun										PD Penanggung jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	1 dokumen	44.540.000	1 dokumen	27.540.000	1 dokumen	47.540.000	1 dokumen	47.540.000	1 dokumen	47.540.000	
Pembahasan Laporan Semester	Jumlah dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD per Semester	0 dokumen	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	
Pembahasan PertanggungJawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan PertanggungJawaban APBD	1 dokumen	1 dokumen	43.191.400	1 dokumen	26.191.400	1 dokumen	46.191.400	1 dokumen	46.191.400	1 dokumen	46.191.400	
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				1.442.598.900		852.598.900		1.442.598.900		1.442.598.900		1.442.598.900	
Keluaran	Jumlah laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang disusun	54 dokumen	68 dokumen		68 dokumen		68 dokumen		68 dokumen		68 dokumen		
Hasil	Persentase laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang disusun	100%	100%		100%		100%		100%		100%		

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator outcome	Baseline tahun 2024	Target dan pagu indikatif tahun										PD Penanggung jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerin-tahan bidang pemerintahan dan hukum	12 dokumen	12 dokumen	28.451.200	12 dokumen	28.451.200	12 dokumen	28.451.200	12 dokumen	28.451.200	12 dokumen	28.451.200	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerin-tahan bidang infrastruktur	12 dokumen	12 dokumen	28.451.200	12 dokumen	28.451.200	12 dokumen	28.451.200	12 dokumen	28.451.200	12 dokumen	28.451.200	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerin tahan bidang kesejahteraan rakyat	12 dokumen	12 dokumen	28.451.200	12 dokumen	28.451.200	12 dokumen	28.451.200	12 dokumen	28.451.200	12 dokumen	28.451.200	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerin tahan bidang perekonomian	12 dokumen	12 dokumen	28.946.200	12 dokumen	28.946.200	12 dokumen	28.946.200	12 dokumen	28.946.200	12 dokumen	28.946.200	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerin tahan bidang Sumber Daya Alam	12 dokumen	12 dokumen	1.000.000	12 dokumen	10.000.000	12 dokumen	10.000.000	12 dokumen	10.000.000	12 dokumen	10.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator outcome	Baseline tahun 2024	Target dan pagu indikatif tahun										PD Penanggung jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah dokumen hasil pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 dokumen	1 dokumen	16.850.000	1 dokumen	16.850.000	1 dokumen	16.850.000	1 dokumen	16.850.000	1 dokumen	16.850.000	
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran	1 dokumen	1 dokumen	700.884.500	1 dokumen	400.884.500	1 dokumen	700.884.500	1 dokumen	700.884.500	1 dokumen	700.884.500	
Pembahasan Laporan Keterang an Pertanggung jawaban Kepala Daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan Laporan Keterang an Pertanggung jawaban Kepala Daerah	1 dokumen	1 dokumen	601.564.600	1 dokumen	310.564.600	1 dokumen	610.564.600	1 dokumen	610.564.600	1 dokumen	610.564.600	
Peningkatan Kapasitas DPRD				3.447.471.900		3.327.471.900		3.327.471.900		3.327.471.900		3.327.471.900	
Keluaran	Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD	106 dokumen	117 dokumen		117 dokumen		117 dokumen		118 dokumen		117 dokumen		
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	16 dokumen	18 dokumen	2.558.820.500	18 dokumen	2.558.820.500	18 dokumen	2.558.820.500	18 dokumen	2.558.820.500	18 dokumen	2.558.820.500	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator outcome	Baseline tahun 2024	Target dan pagu indikatif tahun										PD Penanggung jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6 orang	9 orang	40.000.000	9 orang	20.000.000	9 orang	40.000.000	9 orang	40.000.000	9 orang	40.000.000	
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 orang/ 11 bulan	6 orang/ 12 bulan	220.722.000	6 orang/ 12 bulan	220.722.000	6 orang/ 12 bulan	220.722.000	6 orang/ 12 bulan	220.722.000	6 orang/ 12 bulan	220.722.000	
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat	12 dokumen	12 dokumen	29.990.000	12 dokumen	29.990.000	12 dokumen	29.990.000	12 dokumen	29.990.000	12 dokumen	29.990.000	
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen Rencana Kerja DPRD	1 dokumen	1 dokumen	3.481.500	1 dokumen	3.481.500	1 dokumen	3.481.500	1 dokumen	3.481.500	1 dokumen	3.481.500	
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi Dewan	4 dokumen	4 dokumen	594.457.900	4 dokumen	394.457.900	4 dokumen	394.457.900	4 dokumen	394.457.900	4 dokumen	394.457.900	
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				3.652.504.650		3.152.504.650		3.152.504.650		3.152.504.650		3.152.504.650	
Keluaran	Jumlah dokumen hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan	52 dokumen	52 dokumen		52 dokumen		52 dokumen		52 dokumen		52 dokumen		

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator outcome	Baseline tahun 2024	Target dan pagu indikatif tahun										PD Penanggung jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Hasil	Persentase pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah laporan hasil kunjungan kerja DPRD	48 laporan	48 laporan	34.500.000	15 dokumen	34.500.000	15 dokumen	34.500.000	15 dokumen	34.500.000	15 dokumen	34.500.000	
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	6.880.000	1 dokumen	6.880.000	1 dokumen	6.880.000	1 dokumen	6.880.000	1 dokumen	6.880.000	
Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	3 dokumen	3 dokumen	3.611.124.650	3 dokumen	3.111.124.650	3 dokumen	3.611.124.650	3 dokumen	3.611.124.650	3 dokumen	3.611.124.650	
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				379.465.000		279.465.000		379.465.000		379.465.000		379.465.000	
Keluaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	7 dokumen	7 dokumen		7 dokumen		7 dokumen		7 dokumen		7 dokumen		
Hasil	Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator outcome	Baseline tahun 2024	Target dan pagu indikatif tahun										PD Penanggung jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	- dokumen	1 dokumen	11.004.500	1 dokumen	11.004.500	1 dokumen	11.004.500	1 dokumen	11.004.500	1 dokumen	11.004.500	
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan hasil pengawasan Kode Etik DPRD	7 dokumen	6 dokumen	350.460.500	6 dokumen	268.460.500	6 dokumen	368.460.500	6 dokumen	368.460.500	6 dokumen	368.460.500	
Pembahasan Kerja Sama Daerah				2.000.000		2.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Keluaran	Jumlah dokumen hasil pembahasan kerjasama daerah	- dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
Hasil	Persentase pembahasan kerjasama daerah	-%	100%		100%		100%		100%		100%		
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	- dokumen	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah dokumen bahan komunikasi dan publikasi yang disusun	- dokumen	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	
Fasilitasi Tugas DPRD				8.748.462.650		7.033.345.900		7.033.345.900		7.033.345.900		7.033.345.900	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator outcome	Baseline tahun 2024	Target dan pagu indikatif tahun										PD Penanggung jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Keluaran	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD	106 dokumen	107 dokumen		107 dokumen		107 dokumen		107 dokumen		107 dokumen		
Hasil	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD	99,07%	100%		100%		100%		100%		100%		
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	72 dokumen	72 dokumen	6.907.012.650	72 dokumen	5.615.187.900	72 dokumen	5.615.187.900	72 dokumen	5.615.187.900	72 dokumen	5.615.187.900	
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	5.145.000	1 dokumen	5.145.000	1 dokumen	5.145.000	1 dokumen	5.145.000	1 dokumen	5.145.000	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah	5 dokumen	6 dokumen	1.101.095.600	6 dokumen	751.095.600	6 dokumen	1.101.095.600	6 dokumen	1.101.095.600	6 dokumen	1.101.095.600	
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah laporan fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	29 dokumen	29 dokumen	735.209.400	29 dokumen	661.917.400	29 dokumen	735.209.400	29 dokumen	735.209.400	29 dokumen	735.209.400	

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.2 Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang tidak mengampu sub kegiatan yang langsung mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah, sebagaimana dapat digambarkan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2

Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/SubKegiatan	Ket.
	Nihil			

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, dapat digambarkan pada tabel 4.3 sebagai berikut:

tabel 4.3

Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	%	84,97	85,07	85,17	85,27	85,37	85,47	
2.	Cakupan layanan Sekretariat DPRD	%	80,52	81,52	82,52	83,52	84,52	85,52	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	84,97	85,07	85,17	85,27	85,37	85,47	

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang tidak memiliki Indikator

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kinerja Kunci (IKK) Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tahun 2025-2029, sebagaimana dapat digambarkan pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		NIHIL							

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah menjadi bagian integral dari RPJMD dan RPJMN, memastikan bahwa program dan kegiatan perangkat daerah berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah dan nasional. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD untuk periode tahun 2025-2029 dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pemalang yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah padaRPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Rencana strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan nantinnya akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang. Serta dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang

Evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak yang dihasilkan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk : 1). mengukur sejauhmana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah telah tercapai; 2). Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan; serta mengindentifikasi dampak positif dan negatif dari pelaksanaan Rencana Strategis terhadap masyarakat dan lingkungan. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan RKA

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang ini.

Pemalang, September 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. MULYANTO, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP 19720212 199203 1 004

https://jdih.pemalangkab.go.id

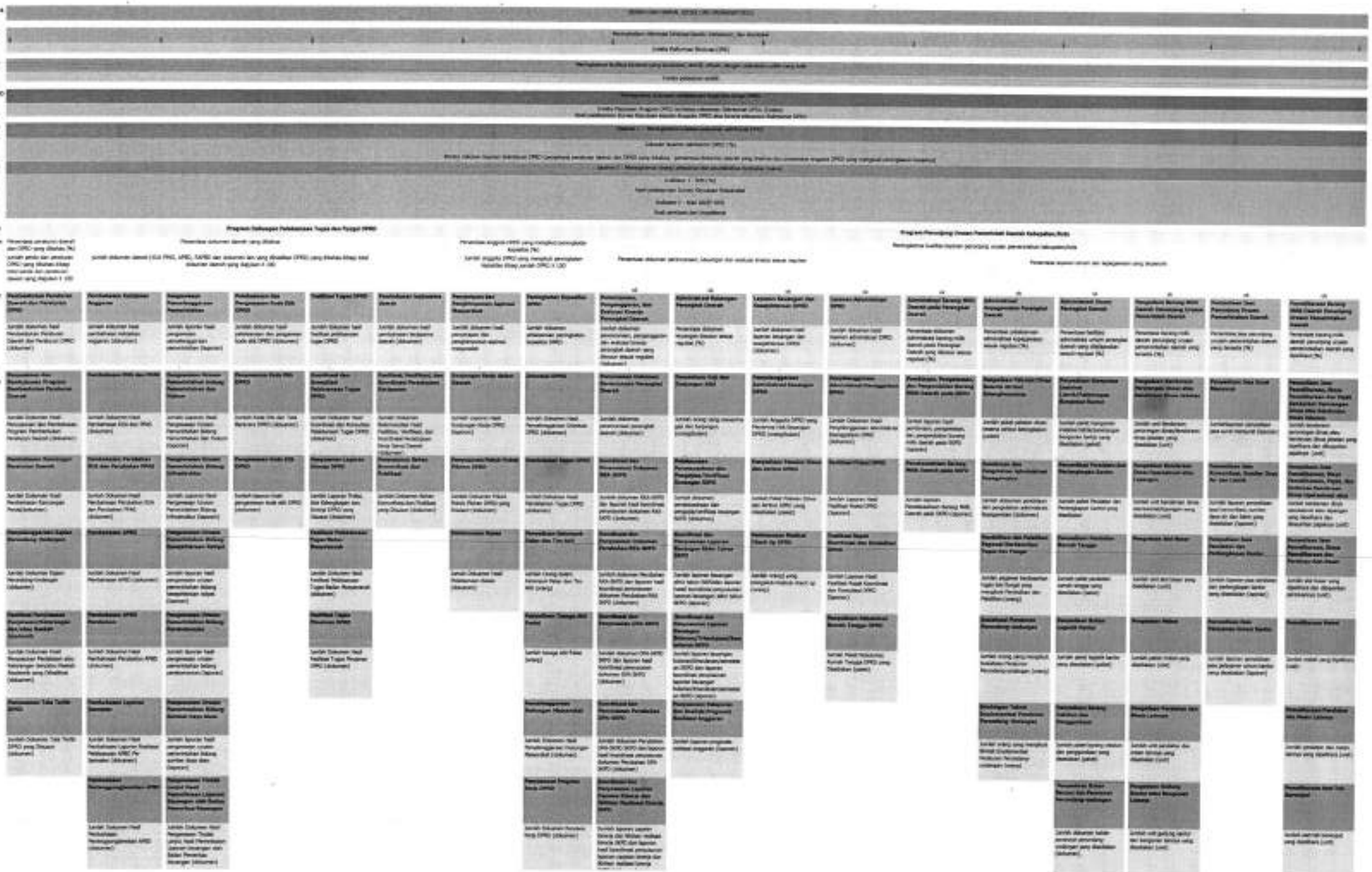

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sejalan dengan itu penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa menjadi cita-cita dan harapan setiap warga negara, tuntutan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik "*Good Governance*" yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, efisien dan efektif yakni dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Dengan demikian kepemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap, prilaku dan kebijakan yang dibuat baik secara politik, hukum, maupun ekonomi dan di informasikan secara terbuka kepada publik.

Mewujudkan °"*Clean and Good Governance*" merupakan tantangan yang harus dipenuhi oleh pemerintah sehingga keinginan masyarakat terhadap pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat menjadi kenyataan. Langkah yang perlu dan harus dikembangkan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik adalah penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan legitimasi, sehingga penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam rangka itu, cara pengelolaan pemerintah dan pembangunan yang perlu dilakukan adalah membangun perubahan secara bersama-sama baik perubahan sektor pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Perwujudan *good* governance dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Pemalang, memerlukan tenaga yang memiliki kompetensi dan profesionalisme serta kinerja yang tinggi. Seluruh pegawai Sekretariat Daerah harus merespon perubahan lingkungan dan perkembangan wilayah yang demikian cepat, mampu menanggapi kebutuhan dan keinginan semua kalangan sehingga bisa memberikan kepuasan layanan pada masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas yang diemban kepadanya. Dalam pelaksanaan tugas, Sekretariat Daerah juga memiliki keterkaitan dengan Kementerian dan Lembaga maupun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meskipun tidak secara langsung yang secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dimana sama-sama berkeinginan mewujudkan tata pemerintahan yang baik, mengedepankan efisiensi dan efektifitas serta pelayanan prima kepada masyarakat.
b. Peningkatan akuntabilitas dan level maturitas Lembaga, upaya perbaikan kualitas layanan harus memiliki indicator yang jelas sehingga dapat dibandingkan kinerjanya dari waktu ke waktu, yang ditunjukkan dalam akuntabilitas kinerja maupun penilaian peringkat level kelembagaan.
c. Harmonisasi produk hukum dengan peraturan perundangan yang berlaku, dimana dalam memberikan pelayanan prima, semua instansi tetap berdasarkan pada peraturan peraturan perundangan yang berlaku.

Oleh karena itu, Rencana Strategis tersebut minimal harus mencakup kebijakan, strategi dan program pembangunan yang perlu dilakukan untuk dapat mensinergikan sumber daya dan potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki. Sumber daya tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial. Kemampuan pemerintah Kabupaten Pemalang dalam mengelola seluruh potensi yang ada akan sangat menentukan perkembangan Kabupaten Pemalang ke arah yang diinginkan.

Proses penyusunan Rencana Strategis harus mempertimbangkan kebutuhan penggunaan sumber daya untuk menyelesaikan isu-isu dan permasalahan strategis yang telah teridentifikasi. Oleh karena itu, Proses penyusunan Rencana Strategis ini memerlukan keterlibatan dari seluruh *stakeholder* yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun external organisasi. Keterlibatan semua pihak di dalam pembuatan rencana strategis diharapkan dapat meningkatkan fokus pencapaian kinerja organisasi, menumbuhkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah disusun dan disepakati bersama serta meningkatan akuntabilitas dan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tahapan proses penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah. Tahap ini dilakukan dengan:
   a. Membentuk tim Penyusun Renscana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang 2025-2029 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 100.3.3.2/37/2025 tanggal 24 Januari 2025 Tentang: Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029;
   b. Melaksanakan orientasi mengenai Renstra untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renstra Setda;
   c. Menyusun tata kala sebagai panduan kerja; dan
   d. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renstra Setda.
2. Penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Sekretariat Daerah Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap gambaran pelayanan Setda, analisis permasalahan, penelahaan dokumen Renstra Kementerian Dalam Negeri, analisis isu strategis, dan perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja.
3. Penyusunan rancangan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Rancangan Renstra Setda adalah penyempurnaan rancangan awal Renstra Setda yang dilakukan berdasarkan Surat Edaran Bupati Pemalang Nomor: 100.3.4.2/1321/Tahun 2025 tanggal 19 Mei 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.
4. Penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis Sekretariat Daerah. Tahap ini merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Sekretariat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Setda dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

https://jdih.pemalangkab.go.id

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
21. Inpres No 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2030;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor .... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;

https://jdih.pemalangkab.go.id

32. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor ... Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
34. Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. MAKSUD

Maksud Penyusunan Rencana Strategis mempunyai maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

1.3.2. TUJUAN

Adapun penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang bertujuan untuk:

a. Menjamin keselarasan dengan dokumen RPJMD dengan menjadikan Renstra Sekretariat Daerah acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah ;
b. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.

Tujuan tersebut didokumentasikan dalam suatu dokumen perencanaan yang memuat berbagai konsep perencanaan yang komprehensif dan operasional sesuai dengan kondisi wilayah dan diharapkan dapat menjadi alternatif tindak lanjut pemecahan agenda pembangunan secara bertahap, terencana dan terarah dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1.4 SISTIMATIKA PENULISAN.

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan informasi umum terkait Latar Belakang, Landasan Hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan informasi terkait Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Kabupaten Pemalang, Sumber daya yang dimiliki yang terdiri dari sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki, Kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada Sekretariat Daerah, Kelompok sasaran

https://jdih.pemalangkab.go.id

pelayanan perangkat daerah, Identifikasi Permaslaahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah, dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menyajikan informasi terkait Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang yang ingin dicapai guna mendukung pencapaian sasaran daerah, Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang sebagai rumusan kondisi dalam menjabarkan pencapaian tujuan perangkat daerah, Strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang yang menjelaskan rencana tindakan komprehensif berupa pentahapan pencapaian, pengalokasian dan penggunaan sumberdaya guna pencapaian tujuan dan sasaran, selain itu juga menyajikan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB VI PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan Program , Kegiatan, Dan Sub Kegiatan yang dipilih untuk mendukung pencapaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Rencana Pendanaan yang dibutuhkan untuk pencapaian hal tersebut, serta kinerja yang hendak dicapai untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

BAB V PENUTUP

https://jdih.pemalangkab.go.id

B A B II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

1. Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah

Pembentukan Sekretariat Daerah mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, susunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Pemalang 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, susunan Sekretariat Daerah Kabupaten. Adapun kedudukan, tugas, dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang diatur melalui Peraturan Bupati Pemalang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.

Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dan menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah.

Sedangkan fungsi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah ;
b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
d. Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi daerah; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari unsur sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari **:**
   2.1 Bagian Tata Pemerintahan
   2.2 Bagian Kesejahteraan Rakyat
   2.3 Bagian Hukum
3. Asisten Ekonomi Pembangunan terdiri dari :
   3.1 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
   3.2 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, didalamnya membawahi

https://jdih.pemalangkab.go.id

4. Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
   4.1 Bagian Organisasi
   4.2 Bagian Perencanaan dan Keuangan, didalamnya membawahi:
   b. Sub Bagian Keuangan
   4.1 Bagian Umum, di dalamnya membawahi:
      a. Subbagian Tata Usaha;
      b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
      c. Subbagian Protokol.
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Sekretariat Daerah dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:

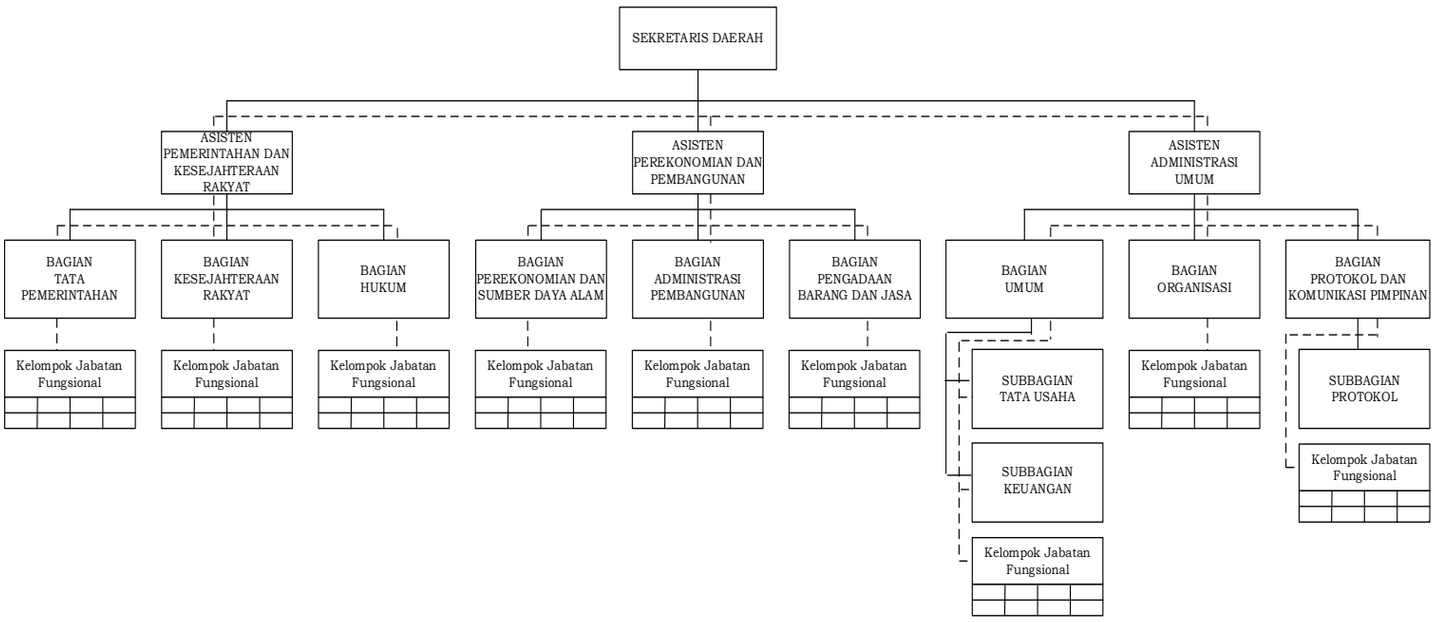

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.2. SUMBER DAYA SEKRETARIAT DAERAH

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan kualitas SDM aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah kabupaten Pemalang, maka telah dilaksanakan bimbingan teknis, sosialisasi maupun workshop baik untuk aparat maupun masyarakat umum. Gambaran pengembangan SDM yang telah dilaksanakan selama tahun 2021-2025 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Realisasi Pengembangan SDM Tahun 2022-2024
Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang

No	PENGEMBANGAN KOMPETENSI YANG DILAKSANAKAN	Pelaksanaan		
		2022	2023	2024
1	BagianUmum		1. Sosialisasi Penatausahaan Keuangan dengan menggunakan Aplikasi SIPD RI 2023 2. Sosialisasi Penatausahaan Keuangan dengan menggunakan Aplikasi SIPD RI dan Aset Daerah 2023 3. Bimbingan Teknis Pengisian Aplikasi SIMPEG dan EKIN 2023 4. Bimbingan Teknis Pengisian Aplikasi Penomoran Surat Rahasia.	1. Sosialisasi Penatausahaan Keuangan dengan menggunakan Aplikasi SIPD RI 2024 2. Sosialisasi Penatausahaan Keuangan dengan menggunakan Aplikasi SIPD RI dan Aset Daerah 2024 3. Bimbingan Teknis Implementasi Aplikai SRIKANDI
2	Bagian Prokompim	1. Bimbingan Teknis Keprotokolan dan MC Tingkat Kabupaten Pemalang	1. Bimbingan Teknis Digitalisasi Layanan Kepegawaian 2. Professional English Training 3. Bimbingan Teknis Penggunaan	1. Bimbingan Teknis Foto Jurnalistik 2. Bimbingan Teknis Implementasi Keprotokolan Indonesia pada Penyelenggaraan Acara di Daerah 3. Bimbingan Teknis Aplikasi Srikandi

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	PENGEMBANGAN KOMPETENSI YANG DILAKSANAKAN	Pelaksanaan		
		2022	2023	2024
			Aplikasi Ki Dalang	4. Bimbingan Teknis Etika & Keprotokolan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah
3	Bagian Organisasi			1. Bimbingan Teknis Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Tahun 2024 2. Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang 3. Bimbingan Teknis Implementasi SAKIP Tahun 2024
4	Bagian Perekonomian dan SDA			1. Bintek Pengelolaan BUMD Air Minum 2. Bintek TOT Insan Perintis Keuangan OJK Tahun 2024 3. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemda dan BUMD Air Minum dengan Tema Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum dan Evaluasi BUMD Air Minum dalam Penetapan Tarif PCR sesuai Permendagri 21 Tahun 2020
5	Bagian Admnistrasi Pembangunan		1. Bimbingan Teknis Penyusunan dan Implementasi Analisis Standar Belanja Fisik	1. Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	PENGEMBANGAN KOMPETENSI YANG DILAKSANAKAN	Pelaksanaan		
		2022	2023	2024
			dan Non fisik sesuai dengan SIPD/SIPD-RI 2. Bimbingan Teknis Sosialisasi dan Pengisian Data Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Pemalang	dan Tematik Tahun 2024 2. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 3. Bimbingan Teknis Implementasi SAKIP Tahun 2024 4. Bimbingan Teknis Pengelolaan Satu Data e-walidata dan informasi geospasial
6	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bimbingan Teknis Pengadaan Langsung Melalui Aplikasi BLANGKON JATENG	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Lelang Jasa Parkir	Bimbingan Teknis Implementasi E-Katalog Versi 6.0
7	Bagian Tata Pemerintahan	1. Pembinaan Kelurahan 2. Bimbingan Teknis mengenai Pemetaan Urusan Pemerintahan Dalam Rangka Kerja Sama Daerah 3. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Nama Rupa Bumi 4. Bimbingan Teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sesuai Permendagri 59 Tahun 2021	1. Bimbingan Teknis Entry Data LKPJ ATA 2022 2. Bimbingan Penyusunan LPPD Kab. Pemalang Tahun 2023	1. Pembekalan Teknis dan Administrasi Tim Sekretariat Desk Pilkada Tahun 2024 2. Bimbingan Teknis Entry Data LKPJ ATA 2023 3. Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Nama Rupabumi bagi Surveyor Konfiemasi dan Verifikasi Hasil EPPD Tahun 2024
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat			
9	Bagian Hukum			1. Bimbingan Teknis Pengembangan

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	PENGEMBANGAN KOMPETENSI YANG DILAKSANAKAN	Pelaksanaan		
		2022	2023	2024
				Kompetensi Analis Hukum: *Teknik Evaluasi Peraturan Perundang-undangan* 2. Bimbingan Teknis Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Tahun 2024 3. FGD *knowledge sharing* Dokumentasi Hukum Adat 4. Training of trainer Partisipasi Publik Rancangan Peraturan Presiden Kepatuhan Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pelaksanaan Hukum. 5. Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Rincian pegawai berdasarkan eselon jabatan dan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana tabel di bawah ini :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.2

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon
Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2025

NO	Uraian	Eselon								Staf		Fungsional		Jumlah		Jumlah Total
		I		II		III		IV								
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Sekretaris Daerah			1										1	0	1
2	Staf Ahli			2										2	0	2
3	Asisten			3										3	0	3
4	Bagian Tata Pemerintahan					1			2	2	4			3	6	9
5	Bagian Hukum					1				2	1	6	3	9	4	13
6	Bagian Perkonomian dan SDA					1					4	1	2	2	6	8
7	Bagian Administrasi Pembangunan					1				4	4	1	1	6	5	11
8	Bagian Kesra					1				3	2	1	1	5	3	8
9	Bagian Organisasi						1					1	5	1	6	7
10	Bagian PBJ					1				5	7	8	5	14	12	26
11	Bagian Prokompim							1		3	1	1	1	5	2	7
12	Bagian Umum					1		1	1	42	13			44	14	58
	Jumlah	**0**	**0**	**6**	**0**	**7**	**1**	**2**	**3**	**61**	**36**	**19**	**18**	**95**	**58**	**153**

Adapun jenjang pendidikan yang dimiiki ASN Sekretariat Daerah dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.3

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan
Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2025

No	Uraian	S3		S2		S1/D4		D3		SLTA		SMP		SD		Jumlah		Jumlah Total
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Sekretaris Daerah			1												1	0	1
2	Staf Ahli			2												2	0	2
3	Asisten	1		2												3	0	3
4	Bagian Tata Pemerintahan			1		1	6			1						3	6	9
5	Bagian Hukum			1	1	7	3			1						9	4	13
6	Bagian Perkonomian dan SDA			2	1		4		1							2	6	8
7	Bagian Administrasi Pembangunan	0	0	2	1	1	4	0	0	3	0	0	0	0	0	6	5	11

https://jdih.pemalangkab.go.id

8	Bagian Kesra			1	1	2					1					3	2	5
9	Bagian Organisasi			1	2	1	5									2	7	9
10	Bagian PBJ			3	1	10	11			1						14	12	26
11	Bagian Prokompim				1		2		4							0	7	7
12	Bagian Umum			1	2	8	7		1	29	4	4		2		44	14	58
Jumlah		**1**	**0**	**17**	**10**	**30**	**42**	**0**	**6**	**35**	**5**	**4**	**0**	**2**	**0**	**89**	**63**	**152**

Dari segi pendidikan, yang memiliki pendidikan S3 sebanyak 1 (satu) orang, S2 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, S1 sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang, D3 sebanyak 6 (enam) orang, SLTA sebanyak 41 (empat puluh satu) orang, SLTP sebanyak 4 (empat) orang dan SD sebanyak 2 (dua) orang. Dengan demikian ASN pada Sekretariat Daerah paling banyak memiliki pendidikan S1, namun demikian masih diperlukan optimalissasi penempatan pegawai sehingga dapat memenuhi prinsip meritokrasi atau personil yang tepat pada tempat yang tepat, sehingga akan bisa memudahkan dalam pencapaian kinerja Perangkat daerah.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan tugas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang, pada tahun 2024 dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut :

a. Bagian Tata Pemerintahan

Tabel 2.4

SARANA DAN PRASARANA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
TAHUN 2024

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	Kondisi
1	Bagian Tata Pemerintahan		
	Alat-alat Angkutan	15	
	- Station Wagon	1	Baik
	- Sepeda Motor	14	Baik
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1	
	- Global Positioning System	1	Baik
	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	- Lemari Besi	1	Baik
	- Filling Besi/Metal	12	Baik
	- Band Kas	1	Baik
	- Lemari Kaca	5	Baik
	- Alat Penghancur Kertas	1	Baik
	- Overhead Projektor	1	Baik
	- Lemari Kayu	1	Baik
	- Meja Rapat	1	Baik
	- Kursi Tamu	1	Baik
	- AC Unit	2	Baik
	- AC Split	5	Baik
	- Televisi	3	Baik
	- Wireless	1	Baik
	- Camera Video	1	Baik
	- Alat Pemadam Portable	2	Baik
	- P.C Unit	2	Baik

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	Kondisi
	- Lap Top	6	Baik
	- Note Book	3	Baik
	- Hard Disk	2	Baik
	- Scanner	1	Baik
	- Printer	10	Baik
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	10	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	Baik
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	3	Baik
	- Proyektor + Attachment	1	Baik
	- Handy Talky	2	Baik

b. Bagian Hukum.

Tabel 2.5

SARANA DAN PRASARANA BAGIAN HUKUM
TAHUN 2024

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	Kondisi
1	Bagian Hukum		
	Alat-alat Angkutan	8	Baik
	- Station Wagon	2	Baik
	- Sepeda Motor	6	Baik
	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	- Lemari Besi	2	Baik
	- Mesin Ketik Manual Standard	1	Baik
	- Rak Besi/Metal	2	Baik
	- Filling Besi/Metal	3	Baik
	- Band Kas	1	Baik
	- Kardek Besi/ Metal	1	Baik
	- Lemari Sorok	1	Baik
	- Lemari Kaca	1	Baik
	- Alat Penghancur Kertas	2	Baik
	- Papan Nama Instansi	1	Baik
	- White Board	1	Baik
	- Overhead Projektor	1	Baik
	- Sun Box Speaker	1	Baik
	- Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1	Baik
	- Meja Kayu/Rotan	2	Baik
	- Meja Rapat	2	Baik
	- Meja Tulis	2	Baik
	- Meja Tambahan	1	Baik
	- Meja Komputer	2	Baik
	- Kursi Rapat	2	Baik
	- Kursi Tamu	1	Baik
	- Kursi Biasa	4	Baik
	- Kursi lipat	1	Baik
	- Jam Elektronik	1	Baik
	- Jam Mekanis	1	Baik
	- AC Unit	6	Baik
	- AC Split	1	Baik
	- Kipas Angin	1	Baik
	- Exhause Fan	2	Baik
	- Televisi	1	Baik
	- Sound System	1	Baik
	- Camera Video	1	Baik

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	Kondisi
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	Baik
	- Personal Komputer Lain-lain	1	Baik
	- P.C Unit	18	Baik
	- Lap Top	8	Baik
	- Note Book	2	Baik
	- CPU	2	Baik
	- Printer	14	Baik
	- Scanner	2	Baik
	- Printer	3	Baik
	- Scanner	2	Baik
	- Router	2	Baik
	- Hub	1	Baik
	- Peralatan Jaringan Lain-lain	1	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	3	Baik
	- Lemari Buku untuk Perpustakaan	4	Baik
	- Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	3	Baik
	- Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	3	Baik
	- Buffet Kayu	1	Baik
	- Buffet Kaca	1	Baik
	Alat Studio dan Alat Komunikasi		
	- Camera + Attachment	1	Baik
	- Proyektor + Attachment	2	Baik
	- Unintemuptible Power Supply (UPS)	2	Baik
	- Audio Cassete Recorder	1	Baik
	- Microphone Table stand	2	Baik
	- Camera Electronic	4	Baik
	- Intermediate Telephone/ Key Telephone	1	Baik
	- Pesawat Telepon	1	Baik
	- Video Tape Recorder Portable	1	Baik
	- Layar Film	1	Baik
	- Facsimile	1	Baik

c. Bagian Kesra

Tabel 2.6

SARANA DAN PRASARANA BAGIAN KESRA
TAHUN 2024

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
1	Bagian Kesejahteraan Rakyat		
	Alat-alat Angkutan	5	
	- Station Wagon	1	Baik
	- Sepeda Motor	4	Baik
	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	- Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	Baik
	- Filling Besi/Metal	4	Baik
	- Band Kas	1	Baik
	- Lemari Kayu	3	Baik
	- Kursi Putar	2	Baik
	- Meja Biro	1	Baik
	- AC Unit	3	Baik
	- Handy Cam	1	Baik
	- Personal Komputer Lain-lain	2	Baik
	- P.C Unit	2	Baik
	- Lap Top	6	Baik
	- Personal Komputer Lain-lain	2	Baik

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
	- Printer	3	Baik
	- Monitor	1	Baik
	- Printer	7	Baik
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	14	Baik
	- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	Baik
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5	
	- Camera + Attachment	1	Baik
	- Proyektor + Attachment	1	Baik
	- Unintemuptible Power Supply (UPS)	3	Baik

d. Bagian Administrasi Pembangunan

Tabel 2.7

SARANA DAN PRASARANA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
TAHUN 2024

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	Kondisi
1	Bagian Administrasi Pembangunan		
	- Transportable Electric Generating Set	1	Baik
	- Station Wagon	1	Baik
	- Sepeda Motor	9	Baik
	- Peralatan Las Listrik	3	Baik
	- Water Pas	2	Baik
	- ALat Ukur Universal Lain-lain	2	Baik
	- ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	5	Baik
	- Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	Baik
	- Lemari Besi	5	Baik
	- Filling Besi/Metal	8	Baik
	- Band Kas	1	Baik
	- Alat Penghancur Kertas	1	Baik
	- Mesin Absensi	2	Baik
	- Zice	1	Baik
	- Meja Rapat	1	Baik
	- Kursi Tamu	1	Baik
	- Kursi Putar	1	Baik
	- Meja Biro	2	Baik
	- AC Unit	5	Baik
	- Dispenser	1	Baik
	- Handy Cam	1	Baik
	- P.C Unit	2	Baik
	- Lap Top	2	Baik
	- Note Book	10	Baik
	- Personal Komputer Lain-lain	3	Baik
	- Hard Disk	1	Baik
	- Printer	2	Baik
	- Monitor	1	Baik
	- Printer	4	Baik
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	Baik
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	12	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
	- Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	1	Baik
	- Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2	Baik

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	Kondisi
	- Camera Electronic	2	Baik
	- Film Projector	1	Baik
	- Camera Vertikal	1	Baik

e. Bagian Perekonomian dan SDA

Tabel 2.8

SARANA DAN PRASARANA BAGIAN PEREKONOMIAN Dan SDA
TAHUN 2024

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
1	Bagian Perekonomian dan SDA		
	Alat-alat Angkutan		
	- Station Wagon	1	Baik
	- Sepeda Motor	9	Baik
	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	- Filling Besi/Metal	10	Baik
	- Band Kas	1	Baik
	- Lemari kayu	2	Baik
	- Alat Penghancur Kertas	1	Baik
	- Meja Rapat	1	Baik
	- Meja Tulis	1	Baik
	- Meja Komputer	2	Baik
	- AC Unit	8	Baik
	- Televisi	2	Baik
	- Wireless	1	Baik
	- Handy Cam	1	Baik
	- Lap Top	14	Baik
	- Personal Komputer Lain-lain	2	Baik
	- Printer	5	Baik
	- Printer	6	Baik
	- Scanner	1	Baik
	Alat Studio dan Alat Komunikasi		
	- Proyektor + Attachment	3	Baik
	- Camera Film	5	Baik
	- Handy Talky	1	Baik
	- Peralatan Antena SHF/Parabola Lain-lain	1	Baik

f. Bagian Umum

Tabel 2.9

SARANA DAN PRASARANA BAGIAN UMUM
TAHUN 2024

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	
	- Portable Generating Set	2	Baik
	- Stationary Generating Set	1	Baik
	- Portable Water Pump	1	Baik
	- Sumersible Pump	4	Baik

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	
	- Sedan	2	Baik
	- Station Wagon	27	Baik
	- Bus (Penumpang 30 Orang ke atas)	2	Baik
	- Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	3	Baik
	- Sepeda Motor	56	Baik
	- Sepeda	7	Baik
	- Mesin Kompresor	1	Baik
	- Mesin Gergaji	1	Baik
	- Scanner	3	Baik
	- Air Conditioning Unit	13	Baik
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.360	
	- Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	3	Baik
	- Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	Baik
	- Mesin Ketik Elektronik	1	Baik
	- Mesin Penghitung Uang	1	Baik
	- Mesin Foto Copy dengan Kertas doble Folio	1	Baik
	- Lemari Besi	4	Baik
	- Rak Besi/Metal	8	Baik
	- Rak Kayu	2	Baik
	- Filling Besi/Metal	21	Baik
	- Band Kas	2	Baik
	- Lemari Kaca	3	Baik
	- Lemari kayu	7	Baik
	- Alat Penghancur Kertas	7	Baik
	- White Board	19	Baik
	- Mesin Absensi	4	Baik
	- Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	4	Baik
	- Papan Struktur	6	Baik
	- Lemari Kayu	23	Baik
	- Meja Kayu/Rotan	1	Baik
	- Kursi Besi/Metal	3	Baik
	- Kursi Kayu/Rotan/Bambu	13	Baik
	- Tempat Tidur Kayu (lengkap)	19	Baik
	- Meja Rapat	26	Baik
	- Meja Tulis	43	Baik
	- Meja Makan	16	Baik
	- Meja Podium	2	Baik
	- Meja Reseption	1	Baik
	- Meja Tambahan	12	Baik
	- Meja Bundar	2	Baik
	- Kursi Rapat	260	Baik
	- Kursi Tamu	17	Baik
	- Kursi Putar	8	Baik
	- Kursi Biasa	19	Baik
	- Kursi Lipat	10	Baik
	- Meja Komputer	10	Baik
	- Kasur	19	Baik
	- Meja Piket	3	Baik
	- Tikar	1	Baik
	- Meja Biro	12	Baik
	- Sofa	17	Baik
	- Lemari Pakaian	22	Baik
	- MOUBILER LAINNYA	9	Baik
	- MOUBILER LAINNYA	1	Baik
	- Jam Mekanis	2	Baik
	- Mesin Penghisap Debu	2	Baik
	- Mesin Potong Rumput	1	Baik
	- Mesin Cuci	6	Baik
	- Alat Pembersih Lain-lain	4	Baik

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	
	- Lemari Es	12	Baik
	- AC Sentral	1	Baik
	- AC Unit	57	Baik
	- AC Split	45	Baik
	- Kipas Angin	18	Baik
	- Exhause Fan	8	Baik
	- Alat Pendingin Lain-lain	2	Baik
	- Kompor Gas	12	Baik
	- Alat Dapur Lainnya	3	Baik
	- Oven Listrik	3	Baik
	- Kitchen Set	31	Baik
	- Alat Dapur Lain-lain	1	Baik
	- Kitchen Set	26	Baik
	- Tempat Sampah	20	Baik
	- Alat Pemanas	2	Baik
	- Televisi	45	Baik
	- Cassette Recorder	1	Baik
	- Amplifiler	4	Baik
	- Equalizer	2	Baik
	- Loudspeaker	21	Baik
	- Sound System	2	Baik
	- Karaoke	2	Baik
	- Mic Conference	12	Baik
	- Unit Power Supply	6	Baik
	- Stabilisator	1	Baik
	- Camera Video	1	Baik
	- Camera Film	12	Baik
	- Tustel	2	Baik
	- Aquarium	3	Baik
	- Kaca Hias	2	Baik
	- Dispenser	27	Baik
	- Gucci	2	Baik
	- Handy Cam	2	Baik
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	36	Baik
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	6	Baik
	- Personal Komputer Lain-lain	3	Baik
	- P.C Unit	27	Baik
	- Lap Top	27	Baik
	- Note Book	10	Baik
	- Personal Komputer Lain-lain	6	Baik
	- Hard Disk	4	Baik
	- Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	1	Baik
	- Printer	40	Baik
	- Scanner	1	Baik
	- Monitor	7	Baik
	- Printer	12	Baik
	- Scanner	1	Baik
	- Peralatan Personal Komputer Lain-lain	5	Baik
	- Server	1	Baik
	- Hub	1	Baik
	- Modem	3	Baik
	- Peralatan Jaringan Lain-lain	1	Baik

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	
	- Meja Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walokota	1	Baik
	- Meja Kerja Eselon I/Wakil Gubernur/Bupati/Walikota	1	Baik
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Baik
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Baik
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	15	Baik
	- Meja Kerja Pejabat Lain-lain	5	Baik
	- Meja Tamu Ruangan Biasa	2	Baik
	- Meja Rapat Pejabat Lain-lain	1	Baik
	- Kursi Kerja Eselon I/Wakil Gubernur/Bupati/Walikot	1	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	14	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	9	Baik
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	8	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	10	Baik
	- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Baik
	- Kursi Tamu di Ruangan Menteri/Gubernur/Bupati/Wali	1	Baik
	- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	9	Baik
	- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	2	Baik
	- Lemari Buku untuk Perpustakaan	3	Baik
	- Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	11	Baik
	- Buffet Kayu	2	Baik
	- Camera + Attachment	3	Baik
	- Proyektor + Attachment	3	Baik
	- Microphone/Wireless Mic	14	Baik
	- Unintemuptible Power Supply (UPS)	14	Baik
	- Enconder/Decoder	2	Baik
	- Peralatan studio Visual Lain-lain	25	Baik
	- Camera Electronic	5	Baik
	- Photo Tustel Polaroid	1	Baik
	- Loudspeaker	1	Baik
	- Telephone (PABX)	3	Baik
	- Pesawat Telephone	27	Baik
	- Telephone Mobile	2	Baik
	- Facsimile	5	Baik
	- Handphone	14	Baik
	- Alat Komunikasi Lain-lain	2	Baik
	- Unit Transceiver VHF Portable	5	Baik
	- Sepeda Statis	1	Baik
	- Alat Kesehatan Olah Raga Lain-Lain	3	Baik
	- Blender	1	Baik
	- Frezeer	1	Baik
	- Personal Komputer	8	

https://jdih.pemalangkab.go.id

g. Bagian Organisasi

Tabel 2.10

SARANA DAN PRASARANA BAGIAN ORGANISASI
TAHUN 2024

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	Kondisi
1	Bagian Organisasi		
	- Station Wagon	1	Baik
	- Sepeda Motor	6	Baik
	Mesin Pelubang (Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi)	1	Baik
	Mesin Ketik Manual	1	Baik
	Lemari Besi/Metal	5	Baik
	Lemari Kayu	1	Baik
	Rak Besi	7	Baik
	Filing Cabinet Besi	1	Baik
	Brandkas	1	Baik
	Lemari Kaca	8	Baik
	Papan Visual/Papan Nama	2	Baik
	White Board	1	Baik
	Alat Penghancur Kertas	2	Baik
	Alat Kantor Lainnya	1	Baik
	Meja Kerja Kayu	1	Baik
	Kursi Besi/Metal	1	Baik
	Kursi Kayu	14	Baik
	Meja Rapat	1	Baik
	Meja Telepon	1	Baik
	Kursi Rapat	1	Baik
	Kursi Putar	4	Baik
	Meja Komputer	1	Baik
	Meubeleur lainnya	2	Baik
	A.C. Sentral	2	Baik
	A.C. Window	2	Baik
	Kipas Angin	1	Baik
	Televisi	6	Baik
	Wireless	1	Baik
	Camera film	3	Baik
	Kaca Hias	1	Baik
	Handy Cam	1	Baik
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV		Baik
	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III		Baik
	Uninterruptible Power Supply		Baik
	Camera Electronic		Baik
	Layar Film/Projector		Baik
	alat komunikasi telephone lainnya (dst)		Baik
	Mainframe (Komputer Jaringan)		Baik
	Lap Top		Baik
	Personal Komputer lainnya		Baik
	CPU (Peralatan Mainframe)		Baik
	Hard Disk		Baik
	CPU (Peralatan Personal Komputer)		Baik
	Printer (Peralatan Personal Komputer)		Baik
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)		Baik
	Peralatan Personal Komputer lainnya		Baik
	Server		Baik
	Hub		Baik

https://jdih.pemalangkab.go.id

h. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Tabel 2.11

SARANA DAN PRASARANA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
TAHUN 2024

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	Kondisi
1	Bagian PBJ		
	- Station Wagon	1	Baik
	- Sepeda Motor	7	Baik
	- Rak Besi	2	Baik
	- Filling Cabinet besi	2	Baik
	- CCTV	1	Baik
	- papan visual/papan nama	1	Baik
	- Alat penghancur kertas 1	1	Baik
	- mesin antrian	1	Baik
	- Meja Kerja Kayu	1	Baik
	- Kursi Besi/Metal	1	Baik
	- Meja rapat	1	Baik
	- Meja resepsionis	1	Baik
	- Kursi rapat	1	Baik
	- Kursi Tamu	1	Baik
	- Kursi Lipat	2	Baik
	- Sofa	1	Baik
	- AC Window	1	Baik
	- AC Split	2	Baik
	- Kipas Angin	1	Baik
	- Televisi	4	Baik
	- Camera Video	2	Baik
	- Tustel	1	Baik
	- Dispenser	1	Baik
	- Bracket Standing Peralatan	1	Baik
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	5	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	5	Baik
	- Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	1	
	- Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	1	Baik
	- Film Projector	1	Baik
	- Telephone mobile	2	Baik
	- PC unit	4	Baik
	- Laptop	7	Baik
	- Notebook	3	Baik
	- Personal Komputer Lainnya	1	Baik
	- Hardisk	1	Baik
	- Printer	6	Baik
	- Scanner	1	Baik
	- External/Portabel hardisk	2	Baik
	- Server	3	Baik
	- Router	1	Baik

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	Kondisi
	- Wireles Access Point	1	Baik
	- Peralatan jaringan Lainnya	1	Baik

i. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Tabel 2.12

SARANA DAN PRASARANA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN TAHUN 2024

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	Kondisi
	- Station Wagon	1	Baik
	- Sepeda Motor	7	
	- Scooter	1	Baik
	- Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	1	Baik
	- Lemari Besi	1	Baik
	- Rak Besi/Metal	1	Baik
	- Filling Besi/Metal	6	Baik
	- Lemari Kaca	2	Baik
	- Lemari kayu	4	Baik
	- Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1	Baik
	- Meja Kayu/Rotan	1	Baik
	- Zice	1	Baik
	- Meja Reseption	1	Baik
	- Kursi Putar	1	Baik
	- Meja Biro	3	Baik
	- Sofa	2	Baik
	- Lemari Es	1	Baik
	- AC Unit	8	Baik
	- AC Split	2	Baik
	- Kipas Angin	1	Baik
	- Televisi	2	Baik
	- Loudspeaker	1	Baik
	- Sound System	1	Baik
	- Microphone	2	Baik
	- Step Up/Down	1	Baik
	- Camera Video	3	Baik
	- Camera Film	1	Baik
	- Tustel	5	Baik
	- Dispenser	2	Baik
	- Handy Cam	1	Baik

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	Kondisi
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	4	Baik
	- P.C Unit	9	Baik
	- Lap Top	3	Baik
	- Note Book	2	Baik
	- Hard Disk	6	Baik
	- Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	2	Baik
	- Printer	3	Baik
	- Scanner	1	Baik
	- Monitor	2	Baik
	- Printer	9	Baik
	- Camera + Attachment	11	Baik
	- Audio Amplifier	1	Baik
	- Compact Disc. Player	2	Baik
	- Disc. Record Player	5	Baik
	- Headphone	2	Baik
	- Microphone/Wireless Mic	2	Baik
	- Battery Charger	3	Baik
	- Enconder/Decoder	1	Baik
	- Audio Cassete Recorder	2	Baik
	- Digital Audio Tape Recorder	1	Baik
	- Peralatan studio Visual Lain-lain	1	Baik
	- Camera Electronic	2	Baik
	- Video Switcher	1	Baik
	- Tripod Camera	4	Baik
	- Lighting Stand Tripod	1	Baik
	- Film Projector	2	Baik
	- Camera Film	3	Baik
	- Lensa Kamera	2	Baik
	- Mixer PVC	1	Baik
	- Layar Film	1	Baik
	- Lighting Head Body	4	Baik
	- Camera Vertikal	1	Baik
	- Megaphone	2	Baik
	- Handy Talky	4	Baik
	- Handphone	7	Baik
	- Unit Transceiver Stationary	2	Baik
	- Alat komunikasi Radio HF/FM Lain-lain	1	Baik
	- Unit Transceiver UHF Portable	1	Baik
	- Unit Pemancar VHF/FM Stationary	1	Baik

Berdasarkan data sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat Daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan untuk mendukung pelayanan publik. Namun demikian, seiring dengan

https://jdih.pemalangkab.go.id

penambahan jumlah pegawai dan jumlah layanan yang diberikan, kindisi tersebut masih belum optimal. Sehingga pada masa mendatang masih memerlukan penambahan maupun perbaikan sarana dan prasarana yang dimikiki untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.3. KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

2.3.1. Kinerja Fisik

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang selama tahun 2021-2024 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang menurut indikator kinerja pelayanan.

Adapun capaian kinerja yang telah dicapai pada periode Tahun 2021-2024 sebagaimana tabel 2.13. dibawah ini:

Tabel 2.13

REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2021 – 2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan dan Kesra yang terlaksana.	√			NA	91,93	92,27	93,13		94,69	95	104,66		**103,00%**	**102,96%**	**112,38%**
	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana.	√			NA	65,81	68,4	69,13		68,94	77,22	76,98		**104,76%**	**112,89%**	**111,36%**

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Umum yang terlaksana.	√			NA	57,87	58,37	58,77		59,85	60,31	60,29		103,42%	103,32%	102,59%
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif		√		9.90	10,3	10,4	10,6		38,69	74,08	50,96		375,63%	712,31%	480,75%
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan		√		56.34	56,9	57	57,1		10,15	11,27	55,5		17,84%	19,77%	97,20%
	Dokumen perencanaan Setda (RKA, RKAP, DPA, DPPA).					6				**6**				100%		
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.						3	3			3	3			100%	100%
	Jumlah bulan terlaksana nya fasilitasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja bagi ASN.					12				12				100%		
2	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN.						174	150			163	132			94%	88%
	Jumlah bulan terlaksananya fasilitasi penatausahaan					12				12				100%		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	keuangan perangkat daerah.															
3	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.						12	12			12	12			100%	100%
	Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun setda yang tersedia.					5				5				100%		
4	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.						1	1			1	1			100%	100%
	Jumlah Buku laporan semesteran yang tersedia.					5				5				100%		
5	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan.						1	1			1	1			100%	100%
	Jumlah Buku RKBMD yang tercetak.					20				20				100%		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
6	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.						2	2			2	2			100%	100%
	Jumlah pakaian dinas yang tersedia.					200				200				100%		
7	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan.						4	4			4	4			100%	100%
	Jumlah Pegawai yang terfasilisitasi urusan kepegawaiannya.					50				50				100%		
8	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.						2	2			2	2			100%	100%
	Jumlah Peserta yang mengikuti workshop guna peningkatan kompetensi pegawai.					30				30				100%		
	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi guna peningkatan kompetensi pegawai.					50				50				100%		
9	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.						75	112			300	112			400%	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	Jumlah pegawai yang mengikuti Bintek.					15				15				100%		
10	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.						13	13			13	13			100%	100%
	Jumlah bulan tersedianya peralatan untuk penerangan bangunan kantor.					12				12				100%		
11	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan.						4	4			4	4			100%	100%
	Jumlah bulan tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor.					12				12				100%		
12	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan.						12	12			12	12			100%	100%
	Jumlah bulan fasilitasi penyediaan peralatan Rumah Tangga.					12				12				100%		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
13	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan.						12	12			12	12			100%	100%
	Jumlah bulan terfasilitasi nya penyediaan bahan logistik kantor.					12				12				100%		
14	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan.						12	12			12	12			100%	100%
	Jenis Barang Cetakan yang tersedia.					8				8				100%		
15	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan.						12	12			12	12			100%	100%
	Jumlah Bahan bacaan yang tersedia.					1500				1500			#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!
16	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan.						9	9			12	12			133%	133%
	Jumlah bulan terlaksananya pelayanan Fasilitasi kegiatan kunjungan tamu.					12				12				100%		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
17	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu.						12	12			12	12			100%	100%
	Jumlah bulan terfasitasinya pelaksanaan Rakor dan Konsultasi didalam dan luar daerah					12				12				100%		
18	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.						12	12			12	12			100%	100%
	Jumlah Kendaraan dinas yang diadakan					11				11				100%		
19	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan.						0	1			0	1			#DIV/0!	100%
	Jumlah barang Mebeler yang diadakan.					19				19				100%		
20	Jumlah Paket Mebel yang disediakan.						200	24			200	24			100%	100%
	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan					24				24				100%		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
21	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan.						50	25			50	25			100%	100%
	Jumlah bulan terfasilitasi nya penatausahaan persuratan dinas.					12				12				100%		
22	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.						12	12			12	12			100%	100%
	Jumlah bulan tersedianya fasilitasi pemenuhan kebutuhan jasa listrik, telepon, air, internet					12				12				100%		
23	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan.						12	12			12	12			100%	100%
	Jumlah bulan jasa peralatan kantor yang tersedia.					12				12				100%		
24	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan.						12	12			12	12			100%	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	Jumlah bulan terfasilitasi nya pemenuhan kebutuhan jasa kantor					12				12				100%		
25	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12	12			12	12			100%	100%
	Jumlah Kendaraan Dinas atau jabatan yang terfasilitasi pemeiharaanya dan perijinannya					6				6				100%		
26	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.						6	6			6	6			100%	100%
	Jumlah Kendaraan dinas yang terfasilitasi peliharaan dan perijinannya					165				165				100%		
27	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan						150	153			150	153			100%	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	dibayarkan pajak dan perizinannya.															
	Jumlah Mebeler yang dipelihara					40				40				100%		
28	Jumlah Mebel yang dipelihara.						50	83			50	83			100%	100%
	Jumlah luasan Gedung kantor yang terpelihara					136				136				100%		
29	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi.						10	2			10	2			100%	100%
	Jumlah bulan terfasilitasinya pemenuhan kebutuhan pemeliharaan Perlengkapan kantor					12				12				100%		
30	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi.						175	222			175	222			100%	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	Jumlah bulan terfasilitasi nya penyediaan Gaji dan tunjangan KDH dan WKDH					12				12				100%		
31	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan.						2	2			1	1			50%	50%
	jumlah bulan terfasilitasi nya penyediaan pakaian dinas KDH/WKDH					300				250				83%		
32	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan.						12	12			12	12			100%	100%
	Jumlah bulan tersedianya Fasilitasi Perawatan Kesehatan KDH /WKDH					12				12				100%		
33	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala						2	2			2	2			100%	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	Daerah dan Wakil Kepala Daerah.															
	Jumlah bulan tersedianya fasiltasi pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah					12				12				100%		
34	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan.						12	12			12	12			100%	100%
	Jumlah bulan terlaksananya Fasiltasi pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah					12				12				100%		
35	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan.						12	12			0	0			0%	0%
	Jumlah bulan tersedianya Fasilitasi pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah					12				12				100%		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
36	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan.						12	12			12	12			100%	100%
	Jumlah Dokumen Anjab dan Evajab yang tersusun.					2				2				100%		
	Jumlah Dokumen Kelembagaan yang tersusun					2				2				100%		
37	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan.						2	2			2	2			100%	100%
	Kompetisi Inovasi pelayanan publik tahun 2021 yang terlaksana.					1				1				100%		
	Jumlah dokumen hasil SKM yang tersusun					2				2				100%		
	Jumlah KTP PNS yang dicetak.					1500				1500				100%		
	Dokumen Laporan Pembinaan Pelayanan Publik yang tersusun.					1				1				100%		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	Jumlah Dokumen Perbup tentang ketatalaksanaan yang tersusun.					1				1				100%		
38	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana.						2	2			2	2			100%	100%
	Jumlah OPD yang mendapat kan pendampingan pelaksanaan SAKIP.					41				41				100%		
	Jumlah dokumen capaian kinerja triwlan OPD yang tersusun tepat waktu.					32				32				100%		
	Jumlah OPD yang mendapat kan pendampingan pelaksanan RB.					41				41				100%		
	Jumlah dokumen capaian RB triwlanan OPD yang tersusun tepat waktu.					32				32				100%		
39	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.						2	2			2	2			100%	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi pelayanan TNDE yang tersusun.					1				1				100%		
	Jumlah Dokumen evaluasi SOP yang tersusun.					1				1				100%		
	Jumlah Dokumen proses bisnis yang tersusun.					1				1				100%		
40	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana						2	2			2	2			100%	100%
	Jumlah dokumen LKjIP Kabupaten yang tersusun tepat waktu.					1				1				100%		
	Jumlah dokumen laporan capaian RB Kabupaten yang tersusun tepat waktu.					1				1				100%		
41	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.						1	1			1	1			100%	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang terfasilitasi					350				784				224%		
42	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan.						12	12			12	12			100%	100%
	Jumlah buku katalog sambutan pimpinan yang tersusun.					40				40				100%		
	Jumlah materi sambutan pimpinan yang tersusun.					350				701				200%		
43	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan.						12	12			12	12			100%	100%
	Jumlah kegiatan KDH/ WKDH yang terdokumentasi.					350				784				224%		
	Jumlah Katalog Notulensi Rapat KDH					41				41				100%		
44	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan.						12	12			12	12			100%	100%
	Jumlah Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah.					4				5				125%		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Pemalang.					1				0				0%		
	Jumlah Kecamatan yang dimonitoring dan dievaluasi dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).					14				14				100%		
	Jumlah Kelurahan yang diberikan pembinaan dan pengawasan penggunaan dana alokasi kelurahan.					11				11				100%		
	Jumlah Data Monografi Semesteran yang tersusun.					2				2				100%		
45	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan.						2	2			2	2			100%	100%
	Jumlah Nama Rupabumi yang dibakukan.					2				2				100%		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	Jumlah Pilar Batas Daerah yang terpelihara.					5				8				160%		
46	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan.						2	2			2	2			100%	100%
	Jumlah dokumen evaluasi SPM yang tersusun.					1				1				100%		
	Jumlah LPPD yang tersusun.					1				1				100%		
	Jumlah dokumen LKPJ yang tersusun.					1				1				100%		
47	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.						3	4			3	4			100%	100%
	Jumlah Fasilitasi Pelaksana an Kegiatan Keagamaan.					5				7				140%		
	Jumlah terlaksananya pembinaan keagamaan terhadap ASN.					12				12				100%		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	Jumlah terlaksananya pembinaan lembaga keagamaan.					6				6				100%		
	Jumlah terlaksananya fasilitasi rakor dan monev keagamaan					4				4				100%		
	Jumlah fasilitasi pemberian bantuan sosial/hibah keagamaan.					2				2				100%		
48	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual.						4	4			4	4			100%	100%
	Terlaksananya rakor dan monev pelaksanaan kebijakan sosial dan sosialisasi/pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan					5				5				100%		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
49	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB.						2	2			2	2			100%	100%
	Terlaksananya rakor dan monev penanggulangan kemiskinan					4				4				100%		
50	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan						1	1			1	1			100%	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas.															
	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disinkronisasi dan diharmonisasi.					760				564				74%		
	Jumlah Propemperda yang disusun dalam 1 Tahun (Surat Bupati tentang Propemperda Tahun 2023.					1				1				100%		
	Jumlah Raperda menjadi Perda dalam 1 Tahun .					12				13				108%		
	Jumlah Sosialisasi Rancangan Produk Hukum Daerah.					2				2				100%		
	Jumlah Pra Raperda menjadi Raperda di Eksekutif.					12				9				75%		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi pelayanan E Corr yang tersusun.					1				1				100%		
51	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun.						550	550			565	766			103%	139%
	Jumlah Desa Sadar Hukum yang diusulkan.					14				0				0%		
	Jumlah Kelompok Kadarkum yang dibentuk/ dibina.					6				6				100%		
	Jumlah Kelompok Peserta Lomba Kadarkum.					14				14				100%		
	Jumlah laporan data peduli HAM yang disusun.					1				1				100%		
	Jumlah laporan pelaksanaan aksi HAM yang disusun.					3				3				100%		
	Jumlah legal opinion dalam satu tahun.					2				0				0%		
	Jumlah pengaduan masyara kat yang tertangani.					12				16				133%		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi aksi HAM dan Kabupaten/Kota peduli HAM.					35				35				100%		
	Jumlah Unit Bantuan Hukum yang dibentuk untuk menyerselesaikan perkara.					3				1				33%		
	Jumlah Unit Bantuan Hukum yang dibentuk untuk menyelesaikan perkara bagi masyarakat miskin.					6				0				0%		
	Jumlah kegiatan penyuluhan peraturan perundang-undangan di desa dalam 1 tahun.					4				4				100%		
52	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum.						2	2			7	3			350%	150%
	Jumlah Buku Referensi yang dibeli.					40				40				100%		
	Jumlah buku produk hukum daerah yang dicetak.					4250				4250				100%		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	Jumlah kegiatan sosialisasi Produk Hukum Daerah dalam 1 tahun.					14				14				100%		
	Jumlah Produk Hukum Daerah yang dikaji.					5				5				100%		
	Jumlah produk hukum yang dipublikasikan.					20				20				100%		
	Rakor JDIH Tingkat Kabupaten.					2				2				100%		
	Sosialisasi JDIH untuk Desa.					1				1				100%		
	Jumlah Bintek JDIH untuk 14 desa percontohan.					1				1				100%		
	Jumlah produk hukum desa yang diklarifikasi.					100				61				61%		
	Pembinaan produk hukum desa.					14				14				100%		
53	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi.						550	550			644	766			117%	139%

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	Jumlah Naskah Kerja Sama Daerah/ Sinergi yang tersusun.					10				10				100%		
	Jumlah Data Penggalian/ Pemetaan Kerja Sama Daerah.					1				1				100%		
	Jumlah Koordinasi Kerja Sama Wajib yang dilaksanakan.					2				2				100%		
54	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri.						10	10			13	12			130%	120%
	Jumlah MoU yang tersusun					1				0				0%		
55	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri.						1	1			1	1			100%	100%
	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Daerah/ Sinergi					2				2				100%		
56	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.						2	2			2	2			100%	100%
	Jumlah koordinasi pemantauan terhadap kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD					14				14				100%		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
57	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD.						3	3			4	3			133%	100%
	Jumlah kormonevlap DBHCHT yang terselenggara.					4				4				100%		
	Jumlah Rakor Ekuinda dan kormonevlap Ekuinda yang terselenggara.					6				6				100%		
	Jumlah Rakor TPID dan kormonevlap TPID yang terselenggara.					6				6				100%		
58	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian.						4	4			4	4			100%	100%
	Jumlah kormonevlap perkoperasian dan UMKM yang terselenggara					6				6				100%		
59	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan						1	1			1	1			100%	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.															
	Jumlah dokumen penetapan kinerja dan evaluasi kinerja yang tersusun.					4				4				100%		
	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun.					2				2				100%		
60	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah.						6	6			6	6			100%	100%
	Jumlah dokumen standar harga yang tersusun.					3				3				100%		
	Jumlah dokumen ASB yang tersusun.					1				1				100%		
61	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan.						4	4			4	5			100%	125%
	Jumlah laporan pengendali an pembangunan yang tersusun.					4				4				100%		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	Jumlah pekerjaan fisik yang dimonitor.					75				114				152%		
62	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.						4	4			5	4			125%	100%
	Fasilitasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui tender/seleksi.					50				53				106%		
63	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.						55	55			65	62			118%	113%
	Jumlah Desk Rencana Umum Pengadaan.					2				2				100%		
	Jumlah Penayangan paket pengadaan barang dan jasa lewat LPSE.					200				820				410%		
	Penyediaan layanan Internet Service Provider (ISP) untuk LPSE.					12				12				100%		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	Sewa colocation backup server LPSE.					1				1				100%		
64	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik.						4	4			4	4			100%	100%
	Penilaian angka kredit untuk pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa.					5				5				100%		
	Peningkatan kualitas teknis sekretariat dan pokja UKPBJ.					20				20				100%		
	Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Desa di setiap Kecamatan.					14				14				100%		
	Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di OPD Kab. Pemalang.					41				41				100%		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
65	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa untuk penilaian angka kredit.						20	20			20	20			100%	100%
	Jumlah kormonevlap KP3 dan PPTR yang terselenggara.					12				12				100%		
	Jumlah Asistensi kegiatan DBHCHT.					3				3				100%		
	Jumlah Monev DBHCHT.					40				40				100%		
	Jumlah Rakor DBHCHT.					25				25				100%		
66	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja.						2	2			2	2			100%	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	Jumlah koordinasi, monev, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pertambangan dan LH yang terselenggara.					12				12				100%		
67	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian.						1	1			1	1			100%	100%
	Jumlah koordinasi, monev, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan air.					12				12				100%		
68	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat						2	2			2	2			100%	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Renstra PD Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	dan Kawasan Permukiman, Pertanahan.															

https://jdih.pemalangkab.go.id

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat Kinerja IKU Sekretariat Daerah secara umum melebihi target yang telah ditetapkan, baik secara target periodik tahunan maupun target akhir perode Renstra 2021-2026. Capaian sasaran strategis 1 " Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan Dan Kesra" pada Tahun 2024 sebesar 104,66 atau 110,63 % dari target akhir Renstra sebesar 94,40. Capaian ini didukung oleh pencapaian kinerja pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan sinergi daerah yang sangat baik, penyusunan produk hukum daerah yang dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuan dengan kebutuhan, harmonisasi produk hukum daerah dengan peraturan lain yang senantiasa terjaga dengan baik, fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan, serta kepuasan publik atas layanan yang diberikan.

Capaian sasaran strategis 2 " Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan" pada tahun 2024 tercapai kinerja sebesar 76,98 sementara target akhir Renstra adalah 72,13. Hal ini terdapat realisasi melebihi target sebesar 106,72. Kinerja ini didukung oleh perbaikan tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik, kinerja pengawasan pelaksanaan pembangunan yang dilihat dari kondisi serapan anggaran yang semaikin baik, kontribusi pertumbuhan setoran deviden ke Kas daerah yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Capaian sasaran strategis 3 " Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Administrasi Umum" kinerja pada tahun 2024 sebesar 60,29 dari atau 101,17 % dari target akhir Renstra yaitu 59,59. Pencapaian kinerja ini didukung oleh peningkatan kualitas Reformasi Birkrasi yang semaikin baik, kualitas pelayanan publik yang semakin baik, layanan keprotokolan dan dokumentasi yang baik dan memuaskan pengguna layanan, serta kepuasan pelanggan atas layanan umum yang diberikan.

Sementara itu kinerja IKK, dimana Sekretariat Daerah melaksanakan dua indikator yaitu Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif dan Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan. Capaian Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif pada tahun 2024 sebesar 50,96 atau 467 % dari target akhir Renstra sebesar 10,9. Realisasi yang sangat tinggi disebabkan adanya perbedaan metodologi penghitungan sewaktu penyusunan target dan penghitungan kinerja, dimana ketita penghitungan kinerja diperoleh melalui perhitungan belanja yang dilakukan melalui tender dan penunjukan langsung sementara penghitungan target hanya memperhitungkan belanja melalui tender saja. Namun demikian kinerja ini dikategorikan baik, dan menunjukkan adanya perbaikan kualitas Pengadaan Barang dan Jasa dimana 50% lebih belanja pemerintah sudah menerapkan metode kompetitif dan mengurangi praktik swakelola. Diharapkan dengan adanya pencapaian kinerja ini belanja pemerintah semakin efektif dan bisa mendukung pertumbuhan perekonomian daerah.

Untuk indikator IKK yang kedua yaitu Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan, kinerja pada Tahun 2024 sebesar 55,5 atau 96,5 % dari target akhir Renstra sebesar 57,5. Kinerja indikator ini dikategorikan sangat baik dimana 55,5 % belanja selain belanja pegawai sudah dilakukan melalui pengadaan barang baik

https://jdih.pemalangkab.go.id

tender maupun non tender. Kedepan akan terus diupayakan agar semakin besar nilai belanja yang dilakukan melalui metode pengadaan yang efektif dan tepat.

Terkait dengan Program Pengarusutamaan Gender, Sekretariat Daerah tidak memiliki anggaran yang secara spesifik yang yang mendanai program tersebut. Namun demikian, seluruh Program dan Kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang telah mendukung pogram tersebut meskipun tidak secara langsung.

2.3.2. Kinerja Anggaran

Selanjutnya berkaitan dengan kinerja keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang, total anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang periode 2021-2025 sebesar Rp. 284.017.100.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi Rp.274.594.694.000,- dan Belanja Modal Rp.9.422.406.000,- Dari Belanja tersebut terealisasi sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp. 206.091.283.000,- (91,73%) yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. 199.631.172.000,- (93,30%) dan Belanja Modal sebesar Rp. 6.460.611.000,- (90,53%). Secara lengkap anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel 2.14. di bawah ini :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.14

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2021 – 2025
dalam ribuan (Rp)

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggar			
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
Belanja	47.713.478	67.160.820	59.413.929	51.884.523	57.844.350	42.679.118	60.800.705	55.285.280	47.326.180	0	89%	91%	93%	91%
Belanja Operasi	45.302.343	64.419.701	58.850.215	50.957.489	55.064.946	40.366.613	58.130.929	54.729.894	46.403.736		89%	90%	93%	91%
Belanja Modal	2.411.135	2.741.119	563.714	927.034	2.779.404	2.312.505	2.669.776	555.386	922.444		96%	97%	99%	100%
Program Kesejahteraan Rakyat	2.849.847.400	18.652.559.773	22.029.076.866	15.944.376.006	20,070,911,910	2.774.644.014	16.121.262.505	19.653.689.409	13.545.619.655		97.36	86.43%	89.22%	84,96%
Program Perekonomian dan Pembangunan	4.898.640.100	3.199.309.874	3.240.205.243	2.275.253.366	1,454,459,200	1.728.886.579	2.871.756.596	3.174.864.602	2.216.050.998		35.29%	89.76%	97.98%	97,40%
Program Penunjang Pemerintahan Daerah	39.964.990.900	45.308.951.353	34.144.648.141	33.664.893.899	36,318,979,478	38.175.588.845	41.007.687.137	32.468.120.033	31.665.649.755		95.52%	90.51%	95,09%	94,06

https://jdih.pemalangkab.go.id

Mendasarkan pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang 2021-2024 yang masuk dalam kategori sangat baik, maka sebagai upaya optimalisasi kinerja pada periode 2025-2029 Sekretariat Daerah berupaya meningkatkan kinerja lebih baik dengan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi. Hal yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah adalah melalui mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Tata kelola pemeritahan yang efektif dan efisien akan dicapai melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas efisiensi dan efektivitas implementasi kebijakan daerah. Hal tersebut dapat mendorong kegiatan pemerintah dapat fokus pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan pemerintah daerah sangat beragam sehingga untuk lebih meningkatkan fokus kerja evaluasi, maka pemantauan akan dibagi ke dalam evaluasi efektifitas kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, evaluasi efektifitas kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan, dan evaluasi efektifitas kebijakan di bidang Administrasi Umum. Diharapkan melalui evaluasi efektifitas dan efisiensi implementasi kebijakan maka pencapaian program.

2.4. KELOMPOK SASARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Mendasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024, kelompok sasaran dari layanan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Pemalang, hal ini terkait layanan koordinatf, evaluasi pelaksanaan tugas, penyusunan dan evaluasi kebijakan daerah.
2. Masyarakat Kabupaten Pemalang, yang mendapatkan layanan berupa pemberian Hibah/Bansos Keagamaan, fasilitasi pelaksanaan hari besar keagamaan, fasilitasi persuratan, fasilitasi keikutsertaan dalam pengadaaan barang dan jasa pemerintah.

2.5. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Sekretariat Daerah tidak bisa terlepas dari hubungan dengan berbagai pihak, baik itu internal seluruh perangkat daerah di Kabupaten Pemalang, Pemerintah Provinsi, dan juga Pemerintah Pusat. Akibat dari hubungan tersebut maka terdapat faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Sekretariat Daerah. Adanya faktor-faktor tersebut dapat menjadi ancaman maupun peluang dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

Berikut ini adalah identifikasai permasalahan pokok, permasalahan, dan akar permasalahan atas penyelenggaraan layanan Sekretarat Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diberikan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

TABEL 2.15

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	• Perlunya peningkatan kompetensi SDM penyusun produk hukum daerah • Belum optimalnya fasilitasi penyusunan dan dokumentasi produk hukum daerah serta pemberian fasilitas bantuan hukum bagi masyarakat miskin. • Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pemalang • Belum optimalnya layanan pemerintah di tingkat kecamatan • Belum optimalnya pelaksanaan kerja sama daerah dan sinergi • Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat
Belum optimalnya kualitas kebijakan daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan	Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perekonoian dan Pembangunan	• Belum optimalnya Proses PBJ • Belum optimalnya efisiensi dan efektifitas kinerja BUMD • Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan perekonomian daerah dalam pengendalian inflasi dan distribusi barang pokok • Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas kebijakan daerah di bidang Administrasi Umum	Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Administrasi Umum	• Belum optimalnya pelayanan publik di Kabupaten Pemalang • Masih rendahnya kematangan kelembagaan perangkat daerah • Belum optimalnya pelaporan akuntabilitas daerah

Apabila dilihat dari sudut pandang aspek layanan, alur permasalahan yang muncul akan disajikan sebagaimana tabel berikut.

TABEL 2.16

PEMETAAN ANALISI LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

Aspek	Capaian Saat ini	Faktor yang Memengaruhi		Permasalahan Perangkat Daerah
		Internal	Eksternal	
Pelayanan pengadaan barang/ jasa	Belum optimalnya hasil peniilaian ITKP	Kompetensi SDM PBJ	Kompetensi SDM PBJ	Belum optimalnya Proses PBJ
Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD, SPM)	Penyampaian data laporan oleh Perangkat Daerah belum dilaksanakan tepat waktu	Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi pelaporan	Penyampaian data tidak lengkap	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pemalang
Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat	Pelayanan PATEN belum berjalan optimal	Kompetensi SDM belum optimal	Peangkat Daerah belum sepenuhnya melakukan pelimpahan kewenangan kepada Camat	Belum optimalnya layanan pemerintah di tingkat kecamatan
Fasilitasi kerja sama dan sinergi daerah	Pelaksanaan fasilitasi kerjasama bukan berasal dari hasil perencanaan namun hanya	Kuantitas dan kompetensi SDM belum optimal	Kompetensi SDM terkait identifikasi kebutuhan kerja sama daerah belum optimal	Belum optimalnya pelaksanaan kerja sama daerah dan sinergi

https://jdih.pemalangkab.go.id

Aspek	Capaian Saat ini	Faktor yang Memengaruhi		Permasalahan Perangkat Daerah
		Internal	Eksternal	
	sekedar memenuhi kebutuhan			
Pelayanan Publik	Masih terdapat aduan atas layanan publik di Kabupaten Pemalang	Keterbatasan SDM Kompetensi SDM	Kompetensi SDM pelaksana layanan publik belum optimal. SOP dan SPP belum tersusun dengan baik. Masih rendahnya keterlibatan pengguna layanan dalam penyusunan maupun evaluasi standar layanan.	Belum optimalnya pelayanan publik di Kabupaten Pemalang
Kelembagaan		Keterbatasan SDM Kompetensi SDM		Masih rendahnya kematangan kelembagaan perangkat daerah
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Skor penilaian SAKIP komponen pelaporan belum optimal	Aplikasi pelaporan perlu dilakukan updating	Kompetensi SDM Pemanfaatan apikasi pelaporan masih rendah Kualitas pelaporan belum optimal Keandalan data pelaporan masih perlu ditingkatkan Informasi kinerja belum dimanfaatkan secara optimal	Belum optimalnya pelaporan akuntabilitas daerah
Pengelolaan BUMD dan BLUD	Pertumbuhan laba BUMD belum optimal	Kompetensi SDM	Regulasi yang memengaruhi kinerja BUMD.	Belum optimalnya efisiensi dan efektifitas kinerja BUMD

https://jdih.pemalangkab.go.id

Aspek	Capaian Saat ini	Faktor yang Memengaruhi		Permasalahan Perangkat Daerah
		Internal	Eksternal	
			Persaingan usaha dengan bidang usaha sejenis. Permodalan yang belum optimal.	
Penanggulangan inflasi daerah	Angka inflasi masih termasuk tinggi	Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral dalam penanggulangan inflasi dan dan distribusi barang pokok	Mekanisme harga ditentukan oleh pasar	Belum optimalnya kebijakan perekonomian daerah dalam pengendalian inflasi dan distribusi barang pokok
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan		Keterlambatan penyampaan laporan progess pekerjaan	Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah
Fasilitasi penyusunan dan dokumentasi produk hukum daerah	Belum optimalnya skor IRH	Belum optimalnya kompetensi SDM Keterbatasan SDM	Penyelesaian produk hukum terkait dengan pembahasan yang dilakukan oleh instansi lain. Belum tersedianya LBH yang menangani bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pemalang. Dinamika regulasi yang ssangat cepat.	Belum optimalnya fasilitasi penyusunan dan dokumentasi produk hukum daerah serta pemberian fasilitas bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
Fasilitasi peningkatan kesejahteraan masyarakat	Belum meratanya pemberian bantuan hibah/bansos keagamaan dan sosial.	Perlunya peningkatan kompetensi SDM dalam perumusan kebijakan Kesra. Keterbatasan jumlah SDM.	Keterlambatan penyampaian data permohonan bantuan. Keterlambatan penyampaian	Belum optimalnya kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Aspek	Capaian Saat ini	Faktor yang Memengaruhi		Permasalahan Perangkat Daerah
		Internal	Eksternal	
	Persentase penduduk miskin yang masih tinggi.		pertanggungjawaban bantuan.	
Layanan umum dan keprotokolan	Skor IKM atas layanan umum dan keprotokolan yang belum optimal	Keterbatasan jumlah SDM Standar layanan belum terkomunikasikan dengan baik kepada pengguna layanan. Banyaknya saranan dan prasarana penunjang layanan yang belum terpenuhi.		Belum optimalnya pelayanan umum pada Sekretariat Daerah
Akuntabiitas Internal	Nilai SAKIP belum mencapai 70	Kesadaran penyusunan laporan akuntabilitas belum terbangun secara optimal		Belum optimalnya pelaporan akuntablitas internal

2.6. IDENTIFIKASI ISU STRATEGIS

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah. Sedangkan fungsi Sekretariat Daerah adalah :

1. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pemahaman atas kekuatan dan kelemahan internal serta kemampuan membaca peluang dan mengidentifikasi ancaman dari luar, merupakan kunci sukses sebuah organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Hal tersebut bisa dituangkan dalam Analisis SWOT. Berikut ini hasil Analisis SWOT untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

- *Kekuatan (Strenghts),* yaitu situasi dan kondisi internal positif yang memungkinkan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang mengambil peran serta di dalam mewujudkan visi dan misi daerah. Komponen kekuatan yang dimiliki antara lain :
  a. Tugas pokok dan fungsi yang jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
  b. Adanya dukungan kebijakan anggaran dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;
  c. Adanya dukungan dan komitmen dari Pimpinan;
  d. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

- Kelemahan *(Weaknesses)* yaitu situasi dan kondisi internal negatif yang dapat menghambat langkah organisasi di dalam mewujudkan visi dan misi daerah. Komponen kelemahan yang ditengarai ada antara lain :
  a. Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsinya;
  b. Perlunya peningkatan kompetensi SDM Aparatur sesuai dengan bidang tugasnya;
  c. Kurangnya optimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah maupun instansi lainnya;
  d. Kurang optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana dalam penyelesaian tugas.

- *Peluang (Opporttunities)* yaitu situasi dan kondisi eksternal positif yang mempermudah Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang didalam mewujudkan visi dan misi daerah. Komponen peluang yang dapat dijumpai antara lain :

  a. Implementasi Sistem Merit, pemberian tunjangan kinerja, dan pemberian sanksi yang jelas serta tegas bagi aparatur diharapkan dapat memberikan motivasi dalam meningkatkan kinerja aparatur;
  b. Adanya kewajiban dan pemberian penghargaan bagi daerah maupun perangkat daerah yang berhasil melakukan inovasi pelayanan publik;
  c. Adanya kebijakan nasional yang dapat mendorong kinerja Pemerintah Daerah ;
  d. Stabilitas dan kondusivitas daerah.

- Ancaman *(Threats)* yaitu situasi dan kondisi eksternal yang bisa menghambat Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang didalam mewujudkan visi dan misi daerah. Komponen ancaman yang dapat dijumpai antara lain
  a. Kurangnya disiplin dan budaya kerja yang rendah;

https://jdih.pemalangkab.go.id

b. Perubahan iklim global yang cepat;
c. Mekanisme pasar terbuka yang memberikan dampak besar pada perkembangan perekonomian daerah;
d. Perkembangan dan penyebaran teknologi dan informasi yang sangat cepat pada tatanan masyarakat modern.

Dengan memperhatikan keterkaitan dengan Renstra Instansi Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, meskipun tidak terdapat keterkaitan secara langsung terkait sasaran yang hendak dicapai, namun demikian tusi yang diemban memiliki keterkaitan erat terhadap hal tersebut. Keterkaitan ini tidak lepas dari peran dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai koordinator pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pelayanan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Belum optimalnya pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dimana Perangkat Daerah belum memaksimalkan penggunaan e-katalog untuk pengadaan barang dan jasa, sehingga hal tersebut perlu terus didorong untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas pengadaan barang dan jasa. Selain itu, proses tata kelola PBJ juga memerlukan dukungan kompetensi SDM yang baik, sehingga perlu ditingkatkan keikutsertaannya dalam kegiatan pengembagnan kompetensi SDM PBJ.
b. Belum optimalnya pemanfaatan sinergi dan kerja sama untuk mendukung pembangunan daerah, yang pada dasarnya merupakan sebuah hal yang sangat krusial, namun masih ada. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman tugas pokok dan fungsi pada Perangkat Daerah, masih terdapat ego sektoral sehingga tidak mengutamakan kepentingan bersama dalam pencapaian tujuan organisasi. Diharapkan dengan peran koordinatif yang dijalankan bisa membantu pencapaian tujuan daerah melalui optimalisasi kerja sama dan sinergi.
c. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pemalang, yang salah satunya dapat dilihat belum optimanya proses pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat, dimana harapannya dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan pemerintahan.
d. Pelayanan publik yang belum optimal, terutama berkaitan dengan pemenuhan kualitas sarana dan prasarana layanan publik serta penyederhanaan prosedur.
e. Belum optimalnya pelaporan akuntabilitas pemerintah daerah yang berdampak Nilai SAKIP masih rendah.
f. Belum optimalnya kinerja BUMD, dimana belum seluruh BUMD berkontribusi terhadap setoran laba kepada PAD, sehingga

https://jdih.pemalangkab.go.id

kedepannya diharapkan terdapat kebijakan pengelolaan BUMD yang bisa berdampak pada peningkatan efisiensi dan efektifitas kinerja BUMD.

g. Belum optimalnya kebijakan perekonomian daerah yang salah satunya dilihat dari pengendalian inflasi daerah, dimana kebijakan yang ada belum sepenuhnya bisa mengendalikan laju inflasi yang disebabkan kuatnya pengaruh hukum pasar.
h. Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan pembangunan, hal ini menjadi sebuah permasalahan karena kurangnya SDM maupun kompetensi yang dimiliki oleh SDM yang ada. Namun demikian dengan tusi yang jelas, dan komitmen setra dukungan penuh dari pimpinan dalam pelaksanaan tugas diharapkan permasalahan ini dapat teratasi dan kualitas pembangunan daerah bisa meningkat dalam kaitannya mendukung perbaikan dan peningkatan kualitas layanan publik.
i. Perlunya peningkatan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah dengan peraturan perundangan lainnya serta pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dengan adanya keterbatasan SDM baik secara kuantitas maupun kompetensinya, cukup menjadi tantangan dalam peningkatan kualitas layanan dibidang hukum. Namun demikian, dengan adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas, komitmen pimpinan, pemberian tambahan penghasilan yang layak, dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, diharapkan bisa mengatasi permasalahan ini dan meningkatkan kualitas layanan dalam perlindungan pelaksanaan kegiatan sehari-hari melalui aspek peraturan perundangan yang terbarukan.
j. Belum optimalnya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara terintegrasi, menjadi tantangan lain dari layanan Sekeretariat Daerah. Dengan tusi utama sebagai koordinator implemantasi dan evaluasi kebijakan, diharapkan bisa menekan kelemahan lemahnya koordinasi antar Perangkat Daerah. Selain itu, dengan mendasarkan pada Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, dimana Sekretaris Daerah berperan sebagai Wakil Ketua TKPKD, serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat berperan sebagai Wakil Kepala Sekretariat TKPKD, Sekeretariat Daerah memiliki peran yang cukup strategis dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui koordinasi yang baik diharapkan bisa tercipta peningkatan kualitas

https://jdih.pemalangkab.go.id

layanan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terintegrasi.

k. Masih rendahnya kualitas layanan publik yang sesuai dengan prinsip *good governance*, menjadi sebuah tantangan besar untuk bisa menghadirkan pelayanan prima kepada masyarakat. Namun demikian hal tersebut cukup terganjal dengan budaya dan etos kerja pegawai yang masih rendah maupun adanya anggapan pekerjaan sebagai sebuah rutinitas sehingga tidak melahirkan inovasi dalam pelayanan publik. Tantangan ini diharapkan bisa diatasi dengan pemberian kesejahteraan pegawai yang memadai, peningkatan kompetensi untuk pemahaman tusi maupun bekal dalam pemberial pelayanan, maupun dukungan dari pencantuman tugas pokok dan fungsi yang cukup jelas dan mudah dipahami bagi pengampunya.
l. Indeks RB Setda yang masih rendah, tantangan ini masih sama dengan tantangan layanan sebelumnya yaitu terkait kualitas layanan publik, sehingga penyebab dan solusinya tidak jauh berbeda dengan hal tersebut.

Sementara itu peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan tusi dan meningkatkan kinerja antara lain sebagai berkut:

a. Pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai yang bisa memacu peningkatan kinerja aparatur;
   Pemberian tunjangan kinerja sebagai upaya peningkatan kesejahteraan pegawai, dan salah satu mekanisme pemberian penghargaan kinerja pegawai, diharapkan mampu meningkatkan semangan dan etos kerja pegawai yang pada akhirnya diharapkan bisa meningkatkan kinerja organisasi.
b. Adanya kewajiban dan pemberian penghargaan bagi perangkat daerah yang berhasil melakukan inovasi pelayanan publik;
   Dengan adanya kewajiban melaksanakan inovasi dalam pelayanan sebagaimana tusi yang diemban dan adanya kompetisi inovasi pelayanan publik, diharapkan bisa menjadi cambuk semangat pegawai untuk terus berkarya dan memberikan pelayanan yang terbaik.
c. Adanya keinginan kuat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
d. Stabilitas perekonomian daerah.
   Dengan adanya stabilitas perekonomian daerah, diharapkan tidak akan memengaruhi kualitas layanan dan kinerja perangkat daerah, karena tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap anggaran yang telah dialokasikan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal diatas, dengan menggunakan Analisis SWOT, maka sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

a. *Strategi Strenghts Opportunity*, yaitu mendayagunakan kekuatan, memanfaatkan peluang.
b. *Strategi Strenghts Threats,* yaitu mendayagunakan kekuatan, hindari ancaman.
c. *Strategi Weakness Opportunity*, yaitu mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang
d. *Strategi Weakness Threats,* yaitu meminimalkan kelemahan, menghindari ancaman.

ALI / ALE	**Kekuatan (strenghts/S)**	**Kelemahan (Weakness/W)**
	1) Tugas pokok dan fungsi yang jelas 2) Dukungan kebijakan anggaran 3) Adanya dukungan dan komitmen dari Pimpinan 4) Dukungan sarana dan prasarana yang memadai.	1) Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsinya 2) Kompetensi SDM masih rendah 3) Belum optimalnya koordinasi antar PD 4) Kurang optimalnya pemanfaatan sarana dan prasaran.
PELUANG (O)	**S+O**	**W+O**
1) Adanya Sistem Merit dalam pengelolaan SDM Aparatur 2) Kewajiban untuk berinovasi dalam pelayanan 3) Adanya kebijakan nasional yang mendukung kinerja daerah. 4) Stabilitas dan kondusivitas daerah.	1) Mendayagunakan SDM untuk meningkatkan kualitas layanan melalui penerapan sistem merit, inovasi layanan, dan pemberian pernghargaan (S1-O1,2) 2) Mengoptimalkan adanya dukungan dan komitmen pimpinan maupun anggaran serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima yang sejalan dengan kebijakan pusat maupun provinsi (S2,3,4-O2) 3) Melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang jelas serta adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparatur PNS (S1-O1,2).	1) Meningkatkan pemahaman tugas pokok dan fungsi serta mengintensifkan koordinasi antar PD untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (W1, 3-O3) 2) Mengoptimalkan kinerja SDM aparatur dan dukungan sarana dan prasarana yang ada untuk mewujudkan pelayanan prima (W2,3-O2). 3) Meningkatkan kompetensi SDM untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan (W2 – O3)
ANCAMAN (T)	**S+T**	**W+T**

https://jdih.pemalangkab.go.id

ALE \ ALI	Kekuatan (strenghts/S)	Kelemahan (Weakness/W)
1) Kurangnya displin dan budaya kerja yang profesional 2) Kurang tertibnya administrasi, transparansi dan akuntabilitas 3) Pelayanan dianggap sebagai rutinitas 4) Stabilitas ekonomi global yang kurang menentu.	1) Mengoptimalkan pelaksanaan tupoksi yang jelas untuk mengatasi kurang tertibnya administrasi, transparansi dan akuntabilitas 2) Mendayagunakan SDM aparatur dan adanya dukungan dan komitmen dari Pimpinan untuk mengatasi kurangnya disiplin dan budaya kerja yang rendah.	1) Meminimalkan kurangnya pemahaman tupoksi dan mengintensifkan koordinasi antar PD untuk dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah. 2) Meningkatkan kinerja SDM aparatur dan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana untuk menghindari pelayanan dianggap sebagai suatu rutinitas.

Bagan 2.2 Analisis SWOT

TABEL 2.17

Keterkaitan KLHS dengan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
MEMBANTU BUPATI DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PENGOORDINASIAN ADMINISTRATIF TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DAERAH SERTA PELAYANAN ADMINISTRATIF		Belum optimalnya budaya e-government dan upaya peningkatan pendapatan daerah				
	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pemalang	Belum optimalnya budaya e-government dan upaya peningkatan pendapatan daerah				Peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Belum optimalnya layanan pemerintah di tingkat kecamatan	Belum optimalnya budaya e-government dan upaya peningkatan pendapatan daerah				
	Belum optimalnya pelaksanaan kerja sama daerah dan sinergi	Belum optimalnya budaya e-government dan upaya peningkatan pendapatan daerah				
	Belum optimalnya fasilitasi penyusunan dan dokumentasi	Belum optimalnya budaya e-		Dinamika perubahan regulasi		

https://jdih.pemalangkab.go.id

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
	produk hukum daerah serta pemberian fasilitas bantuan hukum bagi masyarakat miskin.	government dan upaya peningkatan pendapatan daerah				
	Belum optimalnya kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat.	Belum optimalnya distribusi kesejahteraan dengan dukungan kepastian hukum yang adil dan berbasis gender		Regulasi terkait pengentasan kemiskinan	Regulasi terkait pengentasan kemiskinan	
	Belum optimalnya efisiensi dan efektifitas kinerja BUMD	Belum optimalnya budaya e-government dan upaya peningkatan pendapatan daerah		Dinamika Regulasi terkait usaha BUMD		Peningkatan efisiensi dan efektivitas implementasi kebijakan di Bidang Perekonomian dan pembangunan
	Belum optimalnya kebijakan perekonomian daerah dalam pengendalian inflasi dan distribusi barang pokok	Belum optimalnya budaya e-government dan upaya peningkatan pendapatan daerah	Stabilitas perekonomian global	Stabilitas perekonomian nasional	Stabilitas perekonomian regoinal	
	Belum optimalnya Proses PBJ	Belum optimalnya budaya e-government dan upaya peningkatan pendapatan daerah		Penggunaan e-katalog untuk kemudahan proses PBJ		
	Belum optimalnya pelayanan publik di Kabupaten Pemalang	Belum optimalnya budaya e-government dan upaya peningkatan pendapatan daerah				Peningkatan efisiensi dan efektifitas impleentasi kebijakan di bidang Administrasi Umum
	Belum optimalnya pelaporan akuntabilitas daerah	Belum optimalnya budaya e-government dan upaya peningkatan pendapatan daerah		Regulasi terkait penilaian akuntabilitas pemerintahan		

Mengacu pada isu-isu strategis yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pemalang, maka dapat diidentifikasi isu strategis yang harus diselesaikan Sekretariat Daerah sebagai berikut :

a. Peningkatan efisiensi dan efektifitas implementasi kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Diharapkan dengan adanya hal tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang dapat memberikan andil dalam pencapaian suksesi Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Peningkatan efisiensi dan efektifitas implementasi kebijakan daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan. Diharapkan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang dapat mengambil peran dalam mengawal implementasi kebujakan dalam peningkatan pertumbuhan ekonoi daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat.
c. Peningkatan efisiensi dan efektifitas implementasi kebijakan daerah di bidang Administrasi Umum. Sekretariat Daerah diharpkan dapat melaksanakan fungsi koordinatif dan evaluatif atas kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas administrasi umum atas pelaksanaan tata kelola pemerintahan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang ada serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 menyebutkan bahwa dalam menghadapi tantangan keadaan Kabupaten Pemalang dalam 5 tahun ke depan dan dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki dalam konstelasi lokal regional maupun nasional, maka Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pemalang terpilih merumuskan visi pembangunan sebagai berikut "**PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA**". Visi ini memiliki pembentuk kata :

1. **Bersih**, Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan.
2. **Cakap,** dimaknai memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
3. **Handal**, dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.
4. **MULYA: Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya**. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius.

Guna mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 6 misi sebagai berikut:

a. **Misi 1 Resik**: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih. Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas

https://jdih.pemalangkab.go.id

udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik

b. **Misi 2 Hijau**: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sector unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau, yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan) yang ramah lingkungan, industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM dimasyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.
c. **Misi 3 Apik**: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penaatan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dari Desa.
d. **Misi 4 Peduli**: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi
e. **Misi 5 Silaturahmi**: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong,tepa selira dan sejahtera Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, dan saling menghormati dan teposliro
f. **Misi 6 Organisatoris**: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan Good Governance, Clean Governance dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.
g. **Misi 7 Digitalisasi**: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar Misi ini mengandung pengertian Pemerintah kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi.
h. **Misi 8 Ikhlas**: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan Misi ini mengandung pengertian Pemerintah

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkan kearifan dan budaya lokal

Adapun keterkaitan Visi dengan Misi Kabuaten Pemalang 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) **Frase Bersih dan Handal** dalam Visi akan dicapai dengan **Misi 1 Resik**: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih; **Misi 6 Organisatoris**: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi dan **Misi 7 Digitalisasi**: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar.
2) **Frase Cakap** dalam Visi akan dicapai dengan **Misi 2 Hijau**: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan; **Misi 3 Apik**: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah dan **Misi 4 Peduli**: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat
3) **Frase MULYA** dalam Visi akan dicapai dengan **Misi 5 Silaturahmi**: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong,tepa selira dan sejahtera dan **Misi 8 Ikhlas**: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan

RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 menjadi pedoman kerja bagi seluruh PD, DPRD dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan. RPJMD juga digunakan untuk memantau kinerja dan perkembangan pembangunan daerah. RPJMD ini akan menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra-PD). Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMD ini akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang, Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administif. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Pemalang dalam kurun waktu lima tahun kedepan maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang mendukung **Frasa Bersih dan Handal** yang selanjutnya dicapai melalui tujuan daerah **Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel** serta sasaran daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id

Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik.

Mendasarkan hal tersebut, Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang 2025-2029 adalah **"Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien".**

Tujuan tersebut akan diwujudkan melalui pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
2. Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
3. Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Administrasi Umum.

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian sasaran dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang sebanyak 4 indikator.

Indikator pada masing-masing sasaran adalah pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2025- 2029

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1.	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.	1.	Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2.	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	2.	Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan
3.	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Administrasi Umum	3.	Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang Administrasi Umum

https://jdih.pemalangkab.go.id

Berdasarkan uraian di atas kita dapat melihat penjabaran sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja organisasi secara vertikal dan horizontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam kinerja sekretariat daerah Kabupaten Pemalang dalam Cascading visi, misi daerah ke perangkat daerah sebagai berikut:

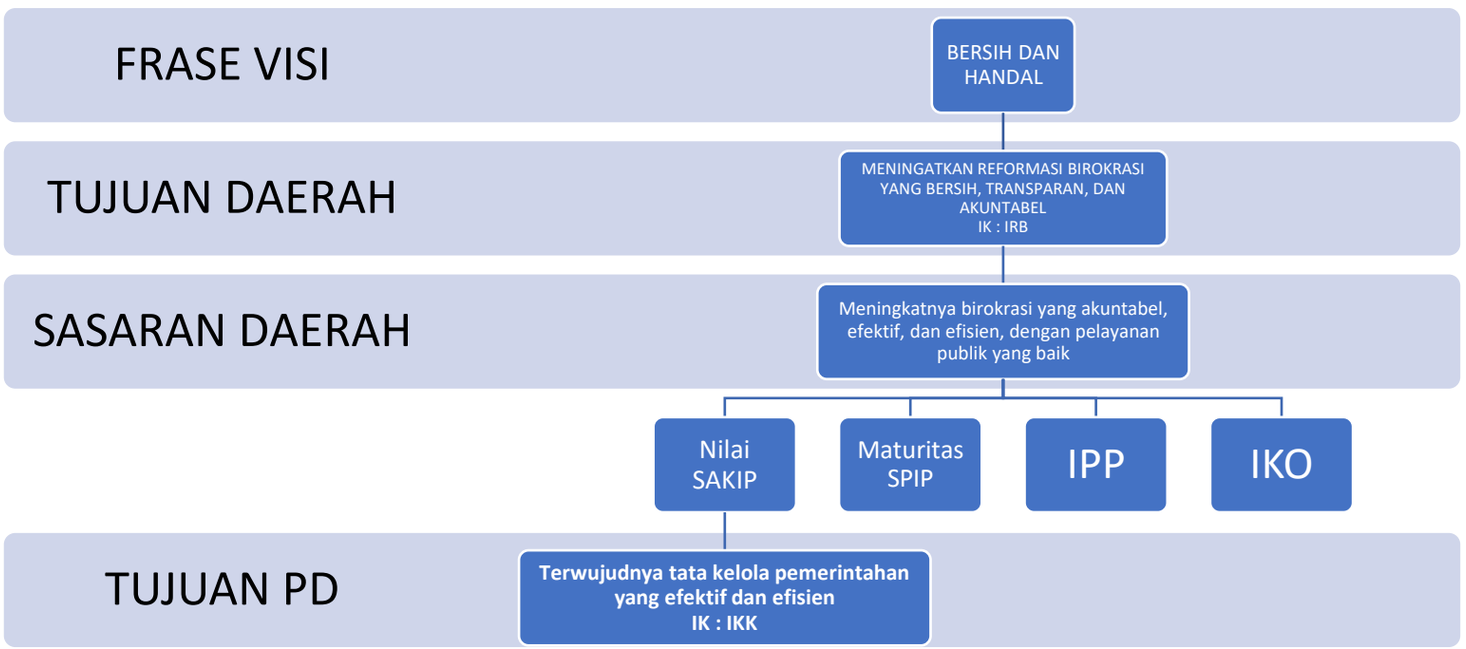

https://jdih.pemalangkab.go.id

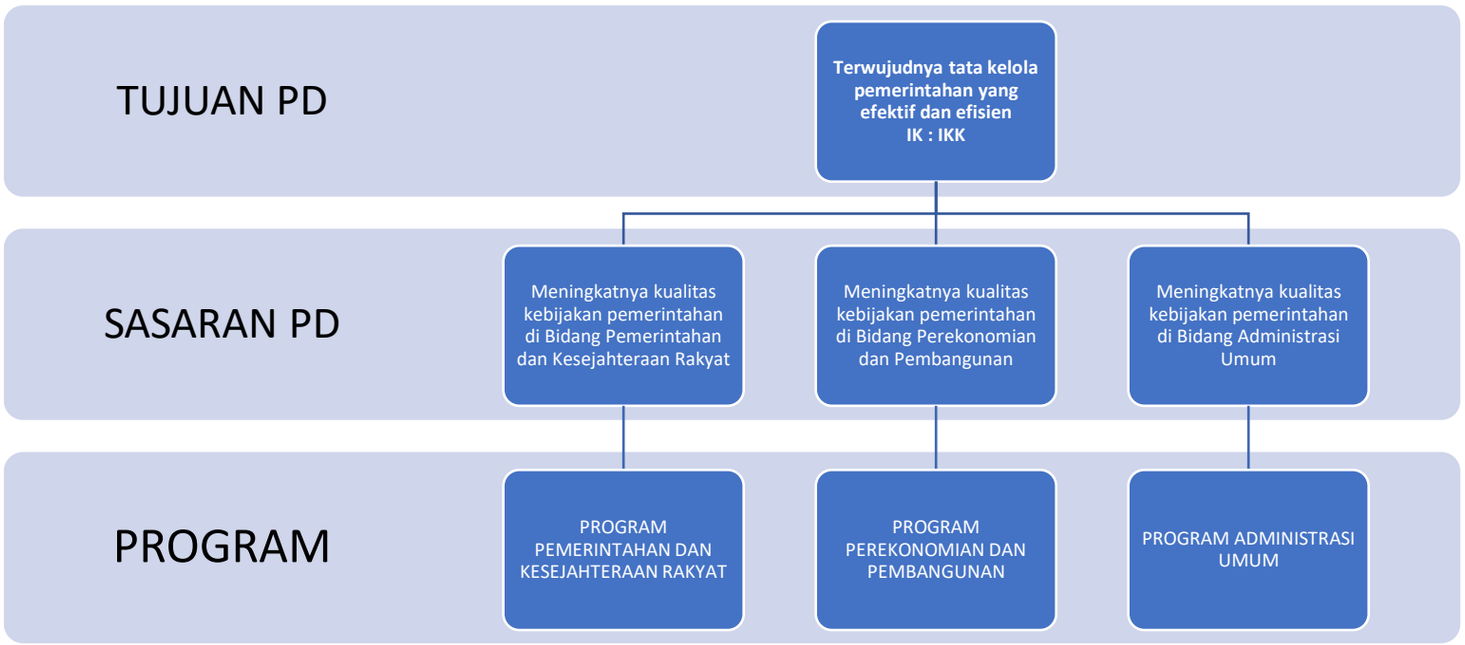

Bagan 3.1 Cascading Visi dan Misi Daerah, Tujuan dan Sasaran Daerah, Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

TABEL 3.2

Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang

Tahun 2025 – 2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya birokrasi yang akuntabel, efektif, dan efisien, dengan pelayanan publik yang baik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		IKK	70.70	70.75	70.80	70.85	70.90	70.95
		Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang pemkesra	35	35.1	35.2	35.3	35.4	35.5
		Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan	35	35.1	35.2	35.3	35.4	35.5
		Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Administrasi Umum	Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang Administrasi Umum	35	35.1	35.2	35.3	35.4	35.5

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi memiliki makna rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Dalam penentuan strategi, Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang tidak terlepas dari strategi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik. Sasaran ini memiliki strategi peningkatan akuntabilitas pembangunan melalui peningkatan kualitas perencanaan, kinerja dan pelaporan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Peningkatan maturitas elola pengendalian intern melalui peningkatan komitmen pemerintah dalam menjalankan pembangunan, penguatan kebijakan dan regulasi, peningkatan kapabilitas APIP, peningkatan kualitas dan profesionalisme pegawai, penguatan manajemen resiko, digitalisasi, serta evaluasi berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, instansi pemerintah dapat mencapai tata elola yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif, sehingga mempercepat keberhasilan reformasi birokrasi . Peningkatan kualitas pelayanan elola dengan mengimplementasikan SOP dan SPP, mewujudkan pelayanan berbasis digital, mudah dan murah.

Strategi RPJMD Kabupaten Pemalang 2025-2029 dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut:

Tahun 2026 Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing Sumberdaya manusia. Prioritas pembangunan adalah memperkuat pertanian sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan. Penguatan petani milenial. Peningkatan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemertaan pembangunan. Peningkatan daya saing SDM baik elola y maupun elola y . Penanganan anak tidak sekolah sebagai upaya mendorong daya saing SDM. Peningkatan perilaku hidup sehat dan kualitas pelayanan. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pemantapan pengelolaan sampah. Peningkatan tata elola pemerintahan yang mampu menciptakan Good and Clean Government.

Tahun 2027 Mengembangkan potensi perekonomian melalui pembangunan pariwisata terintegrasi, elola y bidang pertanian dan perikanan serta pengembangan UMKM. Memperkuat daya saing ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan pembangunan pariwisata, memperkuat industrialisasi bidang pertanian dan perikanan. Peningkatan pendapatan masyarakat dengan mendorong jiwa kewirausahaan dan penguatan UMKM. Pengembangan infrastruktur dalam pengembangan potensi perekonomian daerah. Penguatan daya saing SDM dalam mendorong daya saing ekonomi. Penguatan elola y hijau dan ekonomi sirkuler. Pengelolaan sampah akibat elola y menjadi prioritas.

Tahun 2028 Mempercepat pembangunan perkotaan dan perdesaan guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi dan modernisasi. Peningkatan kualitas pembangunan perkotaan, penataan wialayah perkotaan, membangun area elola yang mendorong aktivitas masyarakat dan ekonomi masyarakat. Memperkuat hilirisasi dan modernisasi. Meningkatkan pembangunan desa sebagai upaya pemerataan pembangunan. Penguatan digitalisasi pelayanan elola, mendorong Smart Village dalam menata desa. Pengembangan Kawasan perdesaan yang mampu mendorong pengembangan elola unggulan. Penguatan tata elola yang mampu mewujudkan penataan perkotaan dan perdesaan. Meningkatkan daya saing SDM kota dan desa dalam mempercepat pembangunan perkotaan dan perdesaan.

Tahun 2029 Mewujudkan daya saing daerah menuju Pemalang Bersih, Cakap, Handal dan Mulya (BERCAHAYA). Pemantapan daya saing daerah baik ekonomi dan SDM, pemantapan kualitas lingkungan menjadikan Pemalang bersih, pemantapan tata elola pemerintahan. Pemantapan harmonisasi pembangunan, sinergitas dan kondusivitas wilayah.

Tahun 2030 Terwujudnya pondasi transformasi menuju akselerasi transformasi untuk mencapai Pemalang MULYA. Tahun ini merupakan transisi pada periode I menuju periode II RPJPD.

Mendasarkan pada strategi RPJMD Kabupaten Pemalang 2025-2029 serta hasil analisis SWOT, maka strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

TABEL 3.3

Strategi dan Arah Kebijakan
Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang 2025-2029

Visi	PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA
Frasa Visi	Bersih dan Handal
Misi	Organisatoris
Tujuan Daerah	Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel IK : IRB
Sasaran Daerah	Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik IK : Nilai SAKIP

Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien .	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah	1. Optimalisasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan pemerintahan 2. Meningkatkan ketepatan maupun kualitas penyusunan pelaporan-pelaporan pemerintahan daerah
		2. Optimalisasi kerjasama maupun sinergi	1. Melakukan integrasi kebutuhan kerjasama daerah dalam dokumen perencanaan perangkat daerah 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kerjasama maupun sinergi dengan pihak lain

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
		3. Peningkatan Penataan dan Kualitas Peraturan Perundangan-undangan	1. Meningkatkan kompetensi SDM penyusun produk hukum daerah 2. Meningkatkan pengkajian dan sinkronisasi produk hukum daerah 3. Optimalisasi Pelayanan bantuan hukum. 4. Meningkatkan kualitas dokumentasi dan publikasi produk hukum daerah. Meningkatkan efisensi dan efektifitas pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait.
		4. Peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan pada upaya peningkataan kesejahteraan rakyat	1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada penyusunan, implementasi dan evaluasi kebijakan layanan pemerintahan di bidang bina mental. 2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada penyusunan, implementasi dan evaluasi kebijakan layanan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada penyusunan, implementasi dan evaluasi kebijakan layanan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
			pemerintahan di bidang pengentasan kemiskinan
	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang perekonomian dan pembangunan	Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan dalam pengembangan perekonomian daerah	1. Melakukan penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan dalam pengelolaan BUMD dan BLUD 2. Melakukan penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan dalam pengelolaan distribusi barang dan jasa pokok 3. Meningkatkan sinergi dengan instansi terkait guna pengembangan lembaga keuangan mikro
		Meningkatkan efektifitas pemantauan implementasi kebijakan SDA	Meningkatkan efektifitas hasil pelaksanaan koordinasi dan konsultansi implementasi kebijakan pemanfaatan SDA untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.
		5. Peningkatan efisiensi dan efektivitas tata kelola pengadaan barang dan jasa	1. Meningkatkan kompetensi SDM Pengadaan Barang dan Jasa Optimalisasi pemanfaata e-katalog dalam proses PBJ
		6. Peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaporan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
		pengendalian pembangunan	pelaksanaan pembangunan
	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang administrasi umum	1. Peningkatan kualitas pelayanan public	Melakukan pembinaan dan pendampingan dalam peningkatan kualitas layanan publik.
		2. Peningkatan Akuntabitas pelaporan kinerja	1. Melakukan pembinaan dan pendampingan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. 2. Peningkatan kompetensi SDM penyusun pelaporan Akuntabilitas kinerja Mendorong pemanfaatan laporan kinerja untuk perbaikan kinerja.

aktivitas pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah dilakukan penahapan yang selaras dengan penahapan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029. Adapun penahapan program prioritas pada Sekretariat Daerah diarahkan sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

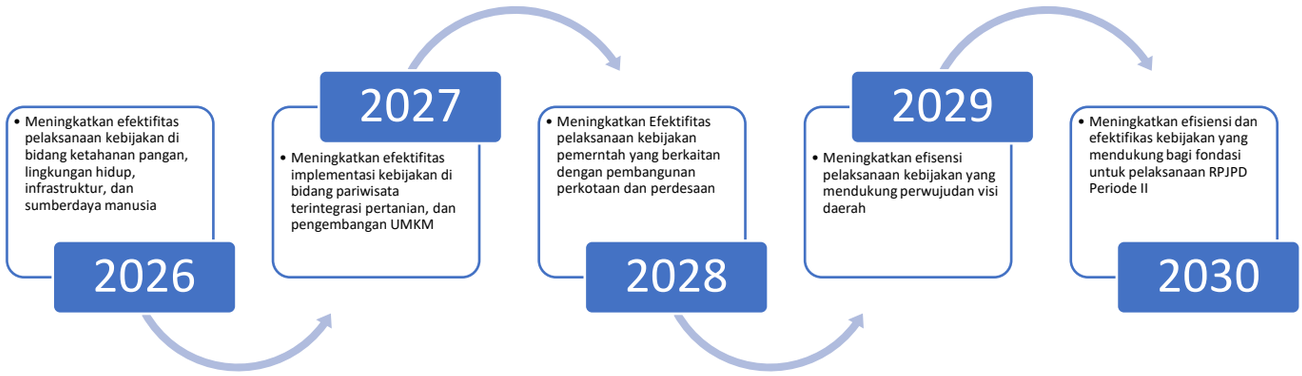

Bagan 3.2 Penahapan pelaksanaan Program Prioritas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang

Tabel 3.4 Penahapan pelaksanaan Program Prioritas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang

TAHAP I (2026)	TAHAP I (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, lingkungan hidup, infrastruktur, dan sumberdaya manusia	Meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan di bidang pariwisata terintegrasi pertanian, dan pengembangan UMKM	Meningkatkan Efektifitas pelaksanaan kebijakan pemerntah yang berkaitan dengan pembangunan perkotaan dan perdesaan	Meningkatkan Efektifitas pelaksanaan kebijakan pemerntah yang berkaitan dengan pembangunan perkotaan dan perdesaan	Meningkatkan efisiensi dan efektifikas kebijakan yang mendukung bagi fondasi untuk pelaksanaan RPJPD Periode II

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program

Mendasarkan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Program disusun dengan memperhatikan sub bidang urusan seauai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Program yang akan dilaksanakan diharapkan dapat menjawab berbagai isu strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang, khususnya pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.

Program-program pembangunan yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 diharapkan mampu memberikan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan menjalankan tugas pokok dan fungsi utama Sekretariat Daerah sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang, Program yang diampu sepenuhnya diarahkan untuk pelaksanaan koordinasi guna pencapaian indikator tujuan maupun sasaran daerah yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan lima tahunan. Hal ini memang tidak secara langsung berdaampak terhadap pencapaian indicator, namun secara tidak langsung, pelakanaan program, kegiatan, maupun sub kegiatan, diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah. Berikut ini adalah program Sekretariat Daerah yang digunakan dalam pencapaian Visi RPJMN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPD Kabupaten Pemalang pada tahun 2025-2029.

Tabel 4.1

Persandingan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, RPJMD Kabupaten Pemalang dan Program pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang

Visi RPJMN	Visi RPJP Provinsi	Visi RPJMD Kabupaten	Program
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan	Organisatoris: Meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani	• Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. • Program Perekonomian

https://jdih.pemalangkab.go.id

Visi RPJMN	Visi RPJP Provinsi	Visi RPJMD Kabupaten	Program
judi, dan penyelundupan	mengedepankan nilai-nilai Integritas	dan mengayomi	dan Pembangunan • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota

4.2 Kegiatan

Kegiatan disusun mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan berfungsi menterjemahkan kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan yang disusun secara tahunan ini menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program yang berdimensi waktu 5 (lima) tahun.

4.3 Sub Kegiatan

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Sub kegiatan merupakan bentuk konkrit aktivitas yang akan menopang kinerja kegiatan, dan menjadi tolok ukur kinerja awal pencapaian indikator yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang, berikut ini adalah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian Program Prioritas Daerah maupun Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah:

Tabel 4.2

Sasaran, Program dan Kegiatan
Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya birokrasi yang akuntabel, efektif, dan efisien,	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien				IKK		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
dengan pelayanan publik yang baik							
		Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Administrasi Umum			Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang Administrasi Umum		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kebijakan pemerintahan bidang adm. Umum		Nilai SAKIP Setda Skor IKM Pemda Nilai SAKIP Pemda Komponen Pelaporan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD.	
				Meningkatnya kualitas layanan umum Setda	Persentase Meningkatnya kualitas layanan umum setda	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Persentase Meningkatnya kualitas layanan umum setda	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.	
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.	
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	
					Persentase Meningkatnya kualitas layanan umum setda	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu.	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	
					Persentase Meningkatnya kualitas layanan umum setda	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	
						Pengadaan Mebel.	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	
					Persentase Meningkatnya kualitas	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					layanan umum setda	Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	
					Persentase Meningkatnya kualitas layanan umum setda	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	
						Pemeliharaan Mebel.	
						Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	
					Persentase meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	
						Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	
						Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	
					Persentase Meningkatnya kualitas layanan umum setda	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah.	
						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah.	
						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.	
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintah daerah	Indeks Organisasi	Penataan Organisasi	
						Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan.	
						Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana.	
						Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.	
						Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana.	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.	
					Persentase Meningkatnya kualitas layanan umum setda	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
						Fasilitasi Keprotokolan.	
						Fasilitasi Komunikasi Pimpinan.	
						Pendokumentasian Tugas Pimpinan.	
		Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan bidang		IRH Persentase kebijakan di bidang tata	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		pemerintahan yang dihasilkan Persentase fasilitasi kerjasama yang terselesaikan Persentase kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang dihasilkan		
				meingkatnya kepatuhan dan tertib administrasi tata pemerintahan	Persentase terlaksananya kepatuhan dan tertib administrasi tata pemerintahan	Administrasi Tata Pemerintahan	
						Penataan Administrasi Pemerintahan.	
						Pengelolaan Administrasi Kewilayahan.	
						Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.	
				Meningkatnya kualitas penanganan permasalahan di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, dan kesejahteran masyarakat	Persentase kebijakan kesra yang dilaksanakan	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
						Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual.	
						Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial.	
						Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat.	
				Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi di bidang hukum daerah	Persentase terlaksananya koordinasi dan fasilitasi hukum daerah	Fasilitasi dan koordinasi Hukum	
						Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah.	
						Fasilitasi Bantuan Hukum.	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.	
				Meningkatnya peran kerjasama dan sinergi daerah dalam pelaksanaan pembangunanda erah	Persentase kerjasama dan sinergi yang ditindaklanjuti	Fasilitasi Kerjasama Daerah	
						Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri.	
						Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri.	
						Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.	
		Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan bidang Perekonomian dan pembangunan			Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan		
			Persentase peningkatan kualitas kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan daerah		ITKP Persentase kebijakan di bidang perekonomian daerah yang dihasilkan Persentase kebijakan pemanfaatan SDA yang dipantau Persentase kebijakan di bidang adpemb yang dihasilkan	Program Perekonomian dan Pembangunan	
				Meningkatnya kualitas penanganan permasalahan di pengelolaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, serta Lembaga Ekonomi Mikro	Persentase kebijakan perekonomian yang dilaksanakan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
						Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD.	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pengendalian dan Distribusi Perekonomian.	
						Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil.	
				Meningkatnya kualitas pengendalian pembangunan	Perentase Meningkatya kualitas pengendalian pembangunan daerah	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
						Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan.	
						Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan.	
						Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.	
				Meningkatnya efisiensi pengadaan barang dan jasa	Persentase Meningkatya efisiensi pengelolaan barang dan jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
						Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.	
						Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik.	
						Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.	
				Meningkatnya kualitas pemantauan pemanfaatan SDA	Persentase kualitas pemantauan pemanfaatan SDA	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan.	
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambang an dan Lingkungan Hidup.	
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.3

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2025 – 2029

dalam ribuan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien				**Skor IKK**	**70,67**	**70,70**	**64544351**	**70,75**	**54544351**	**70,80**	**54544351**	**70,85**	**53584351**	**70,90**	**64544351**	**70,90**	**54330126**	
	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Administrasi Umum			**Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang Administrasi Umum**	**NA**	**35,00**	**36318979**	**35,10**	**36318979**	**35,20**	**36318979**	**35,30**	**35358979**	**35,40**	**36318979**	**35,40**	**36318979**	
		4.01. 01.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.**	**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan bidang Administrasi Umum**	**60.29**	84,59	36318979	84,85	36318979	85,12	36318979	85,38	35358979	87,50	36318979	87,50	36318979	**Bagian Umum Bagian Organisasi Bagian Prokompin**
		4.01. 01. 2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**	**Rata-rata IKM Setda**	**83,64**	83,67	27500	83,70	27500	83,73	27500	83,76	5000	87,5	5000	87,5	5000	**Bagian Umum**
		4.01. 01. 2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	**3.00**	3	27500	3	27500	3	27500	3	5000	3	5000	3	5000	Bagian Umum

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4.01. 01. 2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**	**Rata-rata IKM Setda**	**83,64**	83,67	21958793	83,70	21958793	83,73	21958793	83,76	21909001	87,5	21911293	87,5	21911293	**Bagian Umum**
		4.01. 01. 2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN.	**1,585**	153	21867443	153	21867443	153	21867443	153	21867443	153	21867443	153	21867443	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.02. 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.	**12**	12	80150	12	80150	12	80150	12	30358	12	32650	12	32650	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	**1**	1	6600	1	6600	1	6600	1	6600	1	6600	1	6600	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD.	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan.	**1**	1	4600	1	4600	1	4600	1	4600	1	4600	1	4600	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.03.	**Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.**	**Rata-rata IKM Setda**	**83,64**	83,67	5500	83,70	5500	83,73	5500	83,76	5500	87,5	5500	87,5	5500	**Bagian Umum**
		4.01. 01. 2.03. 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.	**2**	1	5500	1	5500	1	5500	1	5500	1	5500	1	5500	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.**	**Rata-rata IKM Setda**	**83,64**	83,67	104158	83,70	104158	83,73	104158	83,76	54158	87,5	104158	87,5	104158	**Bagian Umum**

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4.01. 01. 2.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan.	**4**	1	35000	1	35000	1	35000	1	35000	1	35000	1	35000	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.05. 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.	**1**	1	4625	1	4625	1	4625	1	4625	1	4625	1	4625	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.05. 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.	**112**	50	50000	50	50000	50	50000	50		50	50000	50	50000	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	**13**	13	14533	13	14533	13	14533	13	14533	13	14533	13	14533	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rata-rata IKM Setda**	**83,64**	83,67	1529558	83,70	1529558	83,73	1529558	83,76	1529558	87,5	1529558	87,5	1529558	**Bagian Umum**
		4.01. 01. 2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan.	**4**	12	85000	12	85000	12	85000	12	85000	12	85000	12	85000	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan.	**12**	12	28725	12	28725	12	28725	12	28725	12	28725	12	28725	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan.	**12**	12	287873	12	287873	12	287873	12	287873	12	287873	12	287873	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan.	**12**	12	25000	12	25000	12	25000	12	25000	12	25000	12	25000	Bagian Umum

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4.01. 01. 2.06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan.	**12**	12	88500	12	88500	12	88500	12	88500	12	88500	12	88500	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan.	**12**	12	89460	12	89460	12	89460	12	89460	12	89460	12	89460	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu.	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu.	**12**	12	250000	12	250000	12	250000	12	250000	12	250000	12	250000	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	**12**	12	675000	12	675000	12	675000	12	675000	12	675000	12	675000	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**	**Rata-rata IKM Setda**	**83,64**	83,67	600000	83,70	320000	83,73	320000	83,76	130000	87,5	320000	87,5	320000	**Bagian Umum**
		4.01. 01. 2.07. 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan.	**1**	1	350000	2	70000	2	70000	2		2	70000	2	70000	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.07. 05	Pengadaan Mebel.	Jumlah Paket Mebel yang disediakan.	**24**	15	100000	15	100000	15	100000	15	100000	15	100000	15	100000	Bagian Umum
		4.01.01. 2.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan.	**25**	15	150000	15	150000	15	150000	15	30000	15	150000	15	150000	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**	**Rata-rata IKM Setda**	**83,64**	83,67	3670355	83,70	3670355	83,73	3670355	83,76	3670355	87,5	3670355	87,5	3670355	**Bagian Umum**

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4.01. 01. 2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	**12**	12	22250	12	22250	12	22250	12	22250	12	22250	12	22250	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan.	**12**	12	1110000	12	1110000	12	1110000	12	1110000	12	1110000	12	1110000	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan.	**12**	12	200000	12	200000	12	200000	12	200000	12	200000	12	200000	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**12**	130	2338105	130	2338105	130	2338105	130	2338105	130	2338105	130	2338105	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**	**Rata-rata IKM Setda**	**83,64**	83,67	1820430	83,70	2034138	83,73	2034138	83,76	1326430	87,5	2034138	87,5	2034138	**Bagian Umum**
		4.01. 01. 2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.	**6**	8	228600	8	228600	8	228600	8	228600	8	228600	8	228600	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya.	**153**	150	404550	150	618258	150	618258	150	404550	150	618258	150	618258	Bagian Umum

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4.01. 01. 2.09. 05	Pemeliharaan Mebel.	Jumlah Mebel yang dipelihara.	**83**	75	85000	75	85000	75	85000	75	85000	75	85000	75	85000	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.09. 09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi.	**2**	7	994000	7	994000	7	994000	7	500000	7	994000	7	994000	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.09. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi.	**222**	147	108280	147	108280	147	108280	147	108280	147	108280	147	108280	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.**	**Rata-rata IKM Setda**	**83,64**	83,67	1228978	83,70	1228978	83,73	1228978	83,76	1228978	87,5	1228978	87,5	1228978	**Bagian Umum**
		4.01. 01. 2.11. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan.	**12**	2	978978	2	978978	2	978978	2	978978	2	978978	2	978978	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.11. 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan.	**12**	12	200000	12	200000	12	200000	12	200000	12	200000	12	200000	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.11. 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	**2**	4	50000	4	50000	4	50000	4	50000	4	50000	4	50000	Bagian Umum

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4.01. 01. 2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah.**	**Rata-rata IKM Setda**	**83,64**	83,67	4250000	83,70	4250000	83,73	4250000	83,76	4250000	87,5	4250000	87,5	4250000	**Bagian Umum**
		4.01. 01. 2.12. 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah.	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan.	**12**	12	2000000	12	2000000	12	2000000	12	2000000	12	2000000	12	2000000	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.12. 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah.	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan.	**-**	12	1500000	12	1500000	12	1500000	12	1500000	12	1500000	12	1500000	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.12. 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan.	**12**	12	750000	12	750000	12	750000	12	750000	12	750000	12	750000	Bagian Umum
		4.01. 01. 2.13	**Penataan Organisasi**	**Rata-rata IKM Pemda**	**85.09**	85,5	573708	86,0	640000	86,5	640000	87,0	700000	87,5	710000	87,5	710000	**Bagian Organisasi**
		4.01. 01. 2.13. 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan.	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan.	**2**	4	250000	4	250000	4	250000	4	300000	4	300000	4	300000	Bagian Organisasi
		4.01. 01. 2.13. 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana.	**2**	6	116956	6	150000	6	150000	6	160000	6	160000	6	160000	Bagian Organisasi
		4.01. 01. 2.13. 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.	**2**	2	70000	2	70000	2	70000	2	70000	2	70000	2	70000	Bagian Organisasi
		4.01. 01. 2.13. 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana.	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan	**2**	2	46753	3	80000	3	80000	3	80000	3	90000	3	90000	Bagian Organisasi

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Publik dan Tata Laksana														
		4.01. 01. 2.13. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.	**1**	2	90000	2	90000	2	90000	2	90000	2	90000	2	90000	Bagian Organisasi
		4.01. 01. 2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.**	**Rata-rata IKM Setda**	**83,64**	83,67	550000	83,70	550000	83,73	550000	83,76	550000	83,8	550000	83,8	550000	**Bagian Prokompin**
		4.01. 01. 2.14. 01	Fasilitasi Keprotokolan.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan.	**12**	12	200000	12	200000	12	200000	12	200000	12	200000	12	200000	Bagian Prokompin
		4.01. 01. 2.14. 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan.	**12**	12	100000	12	100000	12	100000	12	100000	12	100000	12	100000	Bagian Prokompin
		4.01. 01. 2.14. 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan.	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan.	**12**	12	250000	12	250000	12	250000	12	250000	12	250000	12	250000	Bagian Prokompin
	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	NA	35,0	26770912	35,1	16770912	35,2	16770912	35,3	16770912	35,4	26770912	35,4	16556687	
		4.01. 02.	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.**	**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan bidang pemkesra**	**104.66**	98,93	26770912	98,94	16770912	98,95	16770912	98,96	16770912	99	26770912	99	16556687	**Bagian Tapem Bagian Kesra Bagian Hukum**
		4.01. 02. 2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan.**	**% kebijakan di bidang tata**	**NA**	100	509217	100	600000	100	697500	100	852625	100	1238281	100	1238281	**Bagian Tapem**

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				pemerintahan yang dihasilkan *)														
		4.01. 02. 2.01. 01	Penataan Administrasi Pemerintahan.	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan.	**2**	7	188102	14	150000	14	187500	14	234375	14	292969	14	292969	Bagian Tapem
		4.01. 02. 2.01. 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan.	**2**	2	99030	2	100000	2	125000	2	156250	2	195313	2	195313	Bagian Tapem
		4.01. 02. 2.01. 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.	**4**	4	222086	3	350000	3	385000	3	462000	3	750000	3	750000	Bagian Tapem
		4.01. 02. 2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.**	**% kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang dihasilkan**	**NA**	100	25831726	100	15617501	100	15465001	100	15241126	100	24769532	100	14555307	**Bagian Kesra**
		4.01. 02. 2.02. 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual.	**4**	4	25631877	4	15417652	4	15265152	4	15041277	4	24569683	4	14355458	Bagian Kesra
		4.01. 02. 2.02. 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial.	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan	**2**	1	111849	1	111849	1	111849	1	111849	1	111849	1	111849	Bagian Kesra

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB.														
		4.01. 02. 2.02. 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat.	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas.	**1**	1	88000	1	88000	1	88000	1	88000	1	88000	1	88000	Bagian Kesra
		4.01. 02. 2.03	**Fasilitasi dan koordinasi Hukum.**	**Indeks Reformasi Hukum**	**96.72**	96,80	333411	96,83	333411	96,86	333411	96,89	333411	97,00	333411	97,00	333411	**Bagian Hukum**
		4.01. 02. 2.03. 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah.	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun.	**766**		112181		112181		112181		112181		112181		112181	Bagian Hukum
		4.01. 02. 2.03. 02	Fasilitasi Bantuan Hukum.	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum.	**3**		126470		126470		126470		126470		126470		126470	Bagian Hukum
		4.01. 02. 2.03. 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.	Jumlah Produk Hukum dan Informasi Hukum yang didokumentasi.	**766**		94760		94760		94760		94760		94760		94760	Bagian Hukum
		4.01. 02. 2.04	**Fasilitasi Kerjasama Daerah.**	**% kebijakan di bidang tata**	**NA**	100	96558	100	220000	100	275000	100	343750	100	429688	100	429688	**Bagian Tapem**

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				pemerintahan yang dihasilkan *)														
		4.01. 02. 2.04. 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri.	**17**	10	74628	10	150000	10	187500	10	234375	10	292969	10	292969	Bagian Tapem
		4.01. 02. 2.04. 02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri.	**1**	1	17500	1	50000	1	62500	1	78125	1	97656	1	97656	Bag Tapem
		4.01. 02. 2.04. 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.	**2**	2	4430	2	20000	2	25000	2	31250	2	39063	2	39063	Bagian Tapem
	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan bidang Perekonomian dan Pembangunan			Nilai efektifitas kebijakan pendukung program prioritas daerah di bidang Perekonomian dam Pembangunan		35,0	1454459	35,1	1454459	35,2	1454459	35,3	1454459	35,4	1454459	35,4	1454459	
		4.01. 03.	**Program Perekonomian dan Pembangunan.**	**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan bidang Perekonomian dan pembangunan**	**NA**	93,67	1454459	95,33	1454459	97,00	1454459	98,67	1454459	99,33	1454459	99,33	1454459	**Bag. Perekonomian Bagian Adpemb Bagian PBJ**
		4.01. 03. 2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian.**	**% kebijakan di bidang perekonomian daerah yang dihasilkan**	**NA**	100	308582	100	308582	100	308582	100	308582	100	308582	100	308582	**Bagian Perekonomian**
		4.01. 03. 2.01. 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	**3**	3	252069	4	252069	4	252069	4	252069	4	252069	4	252069	Bagian Perekonomian

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Pengelolaan BUMD dan BLUD.														
		4.01. 03. 2.01. 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian.	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian.	**4**	4	40859	4	40859	4	40859	4	40859	4	40859	4	40859	Bagian Perekonomian
		4.01. 03. 2.01. 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil.	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.	**1**	1	15654	1	15654	1	15654	1	15654	1	15654	1	15654	Bagian Perekonomian
		4.01. 03. 2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan.**	**% kebijakan di bidang adpemb yang dihasilkan**	**NA**	100	285725	100	285725	100	285725	100	285725	100	285725	100	285725	**Bagian Adpemb**
		4.01. 03. 2.02. 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah.	**6**	6	47222	6	47222	6	47222	6	47222	6	47222	6	47222	Bagian Adpemb
		4.01. 03. 2.02. 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan.	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan.	**4**	4	180238	4	180238	4	180238	4	180238	4	180238	4	180238	Bagian Adpemb
		4.01. 03. 2.02. 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.	**4**	4	58265	4	58265	4	58265	4	58265	4	58265	4	58265	Bagian Adpemb
		4.01. 03. 2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.**	**ITKP**	**71**	81	372074	86	372074	91	372074	96	372074	98	372074	98	372074	**Bagian PBJ**
		4.01. 03. 2.03. 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.	**62**	20	87709	23	87709	26	87709	30	87709	30	87709	30	87709	Bagian PBJ

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4.01. 03. 2.03. 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik.	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik.	**4**	4	266082	4	266082	4	266082	4	266082	4	266082	4	266082	Bagian PBJ
		4.01. 03. 2.03. 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.	**20**	40	18284	50	18284	50	18284	50	18284	50	18284	50	18284	Bagian PBJ
		4.01. 03. 2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.**	**% kebijakan di bidang perekonomian daerah yang dihasilkan**	**NA**	100	488078	100	488078	100	488078	100	488078	100	488078	100	488078	**Bagian Perekonomian**
		4.01. 03. 2.04. 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja.	**2**	2	467489	2	467489	2	467489	2	467489	2	467489	2	467489	Bagian Perekonomian
		4.01. 03. 2.04. 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambang an dan Lingkungan Hidup.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian.	**1**	1	9093	1	9093	1	9093	1	9093	1	9093	1	9093	Bagian Perekonomian

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4.01. 03. 2.04. 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan.	2	3	11496	3	11496	3	11496	3	11496	3	11496	3	11496	Bagian Perekonomian

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.4 Indikator Kinerja Urama dan Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau pun kualitatif yang mengindikasikan pencapaian program dan atau kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah disepakati atau ditetapkan. Penentuan Kelompok Sasaran kegiatan seoptimal mungkin harus jelas dan spesifik, sehingga memberikan gambaran yang rinci mengenai kelompok sasaran dari kegiatan yang akan dilakukan.

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja dengan indikasi yang baik dan menggambarkan kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktifitasnya.

Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencana sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah tercapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif kebenarannya. Adapun dari indikator kinerja

TABEL 4.4

Target Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai	35	35.1	35.2	35.3	35.4	35.5	
2	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Administrasi Umum	Nilai	35	35.1	35.2	35.3	35.4	35.5	
3	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai	35	35.1	35.2	35.3	35.4	35.5	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Adapun indikator kinerja Kunci yang akan dicapai melalui Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

TABEL 4.5

Target Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah 2025-2029

No	Indikator RPJMD	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Skor	9.90	10,3	10,4	10,6	10,6	10,9
2	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Nilai	56.34	56,90	57	57,10	57,30	57,5

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB V
P E N U T U P

Dalam rangka mewujudkan *Good Governance* dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Pemalang harus terus meningkatkan efektifitas, efensiensi dan inovasi pelaksanaan manajemen pelayanan publik dalam kerangka Visi "**Pemalang BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA".** Visi tersebut menjadi acuan dari gerak dan langkah seluruh komponen dan elemen dilingkungan Sekreatariat Daerah. Diperlukan satu pemahaman dari semua unsur guna menciptakan keselarasan dalam mewujudkan visi dimaksud. Kemudian pada setiap akhir tahun juga perlu dilakukan evaluasi dan kajian terhadap kemajuan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 ini disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor .... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) ini juga merupakan kerangka acuan bagi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang yang disusun setiap tahunnya.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang, berisi program-program dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya indikatif, yang telah disesuaikan dengan Program dan Kegiatan yang ada pada masing – masing Bagian yang ada di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang. Sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan anggaran/dana yang tersedia.

Dalam pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan dan peraturan perundang-undangan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Renstra Sekretariat Daerah 2025 - 2029 yang akan terwujud dalam Perubahan Renstra Sekretariat Daerah 2025 - 2029.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat Daerah ini belum sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami perlukan demi perbaikan Renstra ini. Dan kami berharap agar Rencana Strategis (Renstra) ini dapat diimplementasikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

HERIYANTO, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680214 199103 1 014

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pasal 216 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Inspektorat Daerah dibentuk dalam rangka membantu Kepala Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Hal ini selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, bahwa Inspektorat Kabupaten Pemalang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan. Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pembinaan dan pengawasan, Inspektorat Kabupaten Pemalang secara proaktif berperan dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu mengurangi adanya penyelewengan dan memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan agar mencapai hasil yang diinginkan yaitu kesejahteraan masyarakat. Agar tujuan tersebut dapat tercapai harus didukung oleh perencanaan yang baik sehingga perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan

Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

Inspektorat Kabupaten Pemalang sebagai salah satu perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Renstra. Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Kabupaten Pemalang.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam

https://jdih.pemalangkab.go.id

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Renstra menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Kabupaten Pemalang selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan keterkaitan antara tujuan dan sasaran Daerah dengan tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Pemalang, dimana program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Pemalang harus mendukung tujuan dan sasaran Daerah sehingga visi dan misi Daerah dapat tercapai.

Proses penyusunan Renstra meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, terdiri dari pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah, agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah; (4) Forum Perangkat Daerah; (5) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (6) Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Tahapan penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disajikan dalam bagan berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

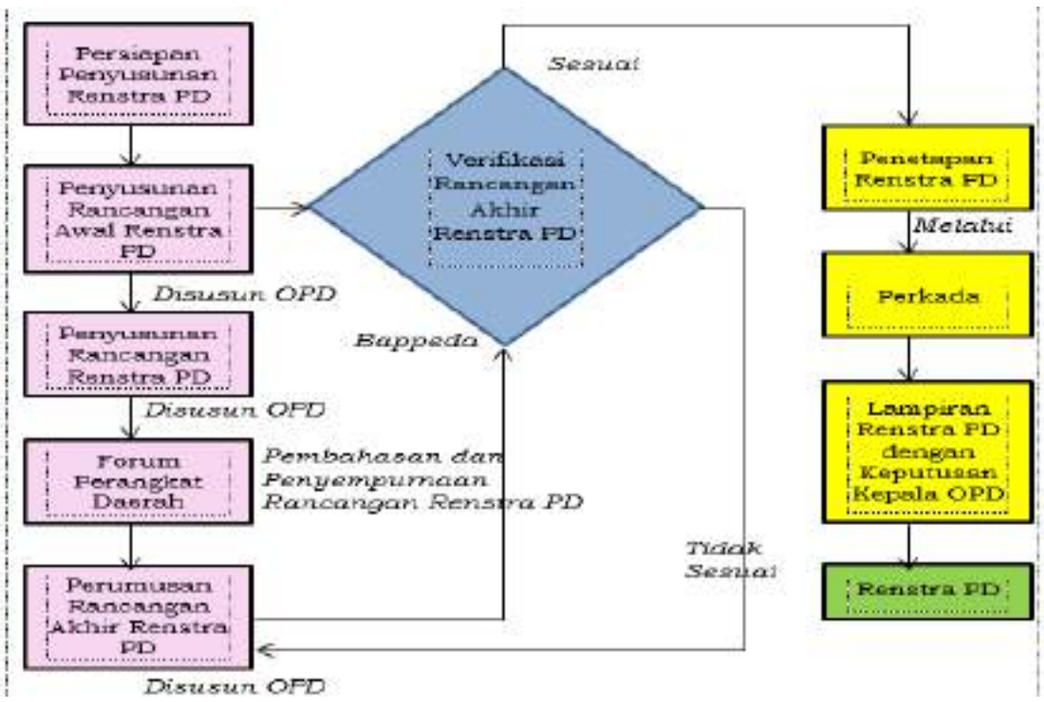

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah)

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut :

Gambar 1.2

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

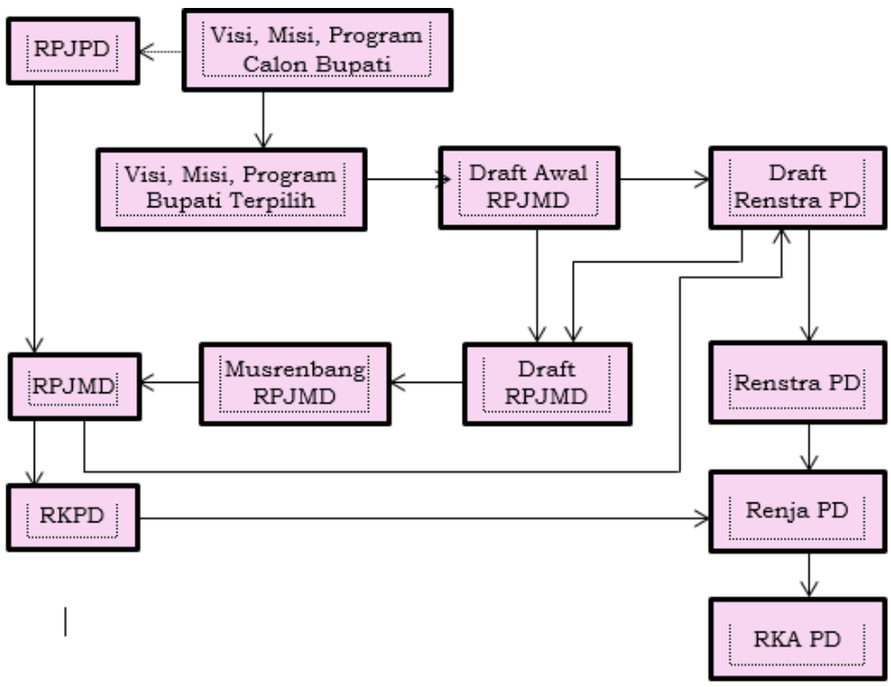

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Kabupaten Pemalang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimanation Against Women*);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

https://jdih.pemalangkab.go.id

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik

https://jdih.pemalangkab.go.id

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

https://jdih.pemalangkab.go.id

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2023;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor X Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor ...., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor ....);
36. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
37. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pemalang.
38. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Inspektorat Kabupaten Pemalang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja

https://jdih.pemalangkab.go.id

penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui peningkatan birokrasi yang akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah di Urusan Pemerintahan Bidang Pembinaan dan Pengawasan;
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Inspektorat Kabupaten Pemalang serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pembinaan dan Pengawasan;
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Inspektorat Kabupaten Pemalang.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan Bab yang berisi tentang latarbelakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG

Dalam Bab II akan dijelaskan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur, Sumber daya, Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan, Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis Inspektorat Kabupaten Pemalang.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bab ini berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Arah Kebijakan serta Manajemen Risiko Strategis Inspektorat Kabupaten Pemalang.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Kabupaten Pemalang serta Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Inspektorat Kabupaten Pemalang.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab penutup ini disampaikan kesimpulan dan ekspektasi terhadap penyelenggaraan pengawasan yang menunjang tata kelola pemerintahan yang baik.

LAMPIRAN

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Pemalang

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Inspektorat Kabupaten Pemalang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan kedua peraturan diatas, Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pemalang, digambarkan dalam bagan struktur dibawah ini :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Pemalang

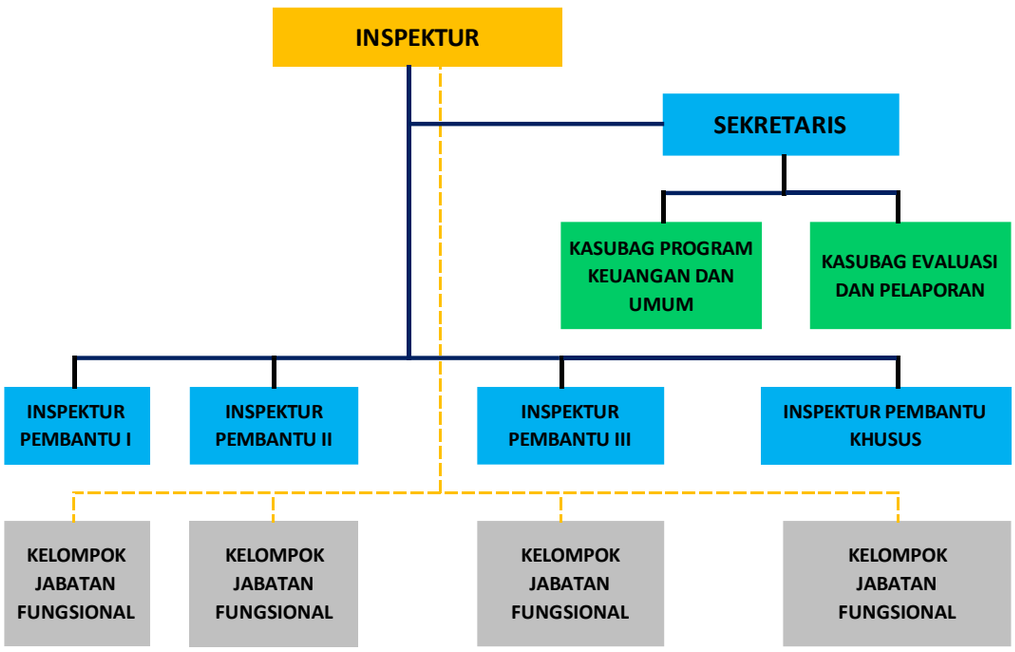

Sumber : *Perbup Pemalang No.3 Tahun 2023*

Berikut uraian tugas jabatan struktural Inspektorat Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pemalang :

1. Inspektur

   Inspektur mempunyai tugas mernimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

2. Sekretariat

   Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Tugas Sekretariat adalah melaksanakan pembinaan teknis dan administratif kedalam semua unsur di lingkungan Inspektorat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Sekretariat melaksanakan fungsi :

   a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dana anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
   b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
   c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
   d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
   e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sekretariat Inspektorat terdiri atas:

a. Subbagian Program, Keuangan dan Umum
   Subbagian Program, Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program, keuangan dan umum.
b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
   Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi dan pelaporan.

3. Inspektorat Pembantu

Inspektorat Kabupaten Pemalang memiliki 4 (empat) jabatan Inspektur Pembantu. Dalam melaksanakan tugasnya, lnspektorat Pembantu menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
d. pengawasan keuangan dan rinerja perangkat daerah;
e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya dan/atau dengan Aparat Penegak Hukum (APH);
h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
i. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas masing-masing Inspektorat Pembantu dapat dijabarkan dalam penjelasan berikut :

a. Inspektorat Pembantu I, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban kinerja umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pertanahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,

https://jdih.pemalangkab.go.id

pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, tenaga kerja, transmigrasi, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta kecamatan.

b. Inspektorat Pembantu II, rnempunyai tugas rnelaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan pembinaan keuangan, dan dan penyelenggaraan urusan pernerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan kinerja ruang, perumahar lingkungan hidup, rakyat perhubungan, dan kawasan permukiman, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perizinan, perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, dan perindustrian, serta kecamatan.
c. Inspektorat Pembantu III, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perpustakaan, kearsipan, keuangan dan aset, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, layanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta kecamatan.
d. Inspektorat Pembantu Khusus, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi dan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.

2.2 Sumber Daya Inspektorat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Pemalang didukung oleh sumber daya aparatur yang secara umum masih dihadapkan pada permasalahan keterbatasan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya sebagaimana data yang tertuang dalam tabel berikut (data per Mei 2025) :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Pemalang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
SMA	3	1	4
D3	11	12	23
S1	26	24	50
S2	5	1	6
Total	45	38	83

Sumber : Subbag PKU Inspektorat Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Pemalang
Berdasarkan Golongan

Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
IV/b	6	-	6
IV/a	2	2	4
III/d	7	5	12
III/c	3	3	6
III/b	3	5	8
III/a	11	12	23
II/d	4	-	4
II/c	7	12	19
II/b	-	-	-
II/a	1	-	1
Total	44	39	83

Sumber : Subbag PKU Inspektorat Pemalang

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Pemalang
Berdasarkan Jabatan

Struktural/Eselon			Jabatan					Jumlah
II	III	IV	JF Auditor	JF PPUPD	JF Perencana	JF Prakom	JFU	
1	4	2	51	14	1	1	9	83

Sumber : Subbag PKU Inspektorat Pemalang

Tabel 2.4
Jumlah Pejabat Fungsional Auditor dan PPUPD
Inspektorat Kabupaten Pemalang

No.	Jenjang Auditor/PPUPD	Jenis Kelamin		Jumlah	
		L	P		
1	Auditor Madya	1	-	1	51
2	Auditor Muda	3	2	5	
3	Auditor Pertama	8	14	22	
4	Auditor Penyelia	2	-	2	
5	Auditor Terampil	9	12	21	

https://jdih.pemalangkab.go.id

No.	Jenjang Auditor/PPUPD	Jenis Kelamin		Jumlah	
		L	P		
6	PPUPD Madya	3	1	4	14
7	PPUPD Muda	2	1	3	
8	PPUPD Pertama	4	3	7	
Jumlah		32	33	**65**	

Sumber : Subbag PKU Inspektorat Pemalang

2.3 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat, akan tetapi kondisinya saat ini masih belum dapat dikatakan mencukupi. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang tersedia pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah meliputi sarana prasarana yang masih layak digunakan, sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Kondisi Eksisting Sarana dan Prasarana
Inspektorat Kabupaten Pemalang

Sarpras/Peralatan	Kondisi 2025		
	Jumlah		Baik/Rusak
Bangunan gedung kantor	22.291	M2	Baik
Electric Generating Set	180	KVA	Baik
Portable Water Pump	2	unit	Baik
Roda 4	9	unit	Baik
Roda 2	25	unit	Baik
Perkakas bengkel/service	2	unit	Baik
Alat ukur universal lainnya (dst)	10	unit	Baik
Alat ukur universal lainnya (dst)	1	unit	Rusak
Mesin Ketik Manual Standard	2	unit	Baik
Alat Penghancur Kertas	5	unit	Baik
Alat Pemotong Kertas	1	unit	Baik
LCD	2	unit	Baik
Kamera	1	unit	Baik
Laptop/Notebook	18	unit	Baik
Tablet/PC	1	unit	Baik
P C	12	unit	Baik
P C	1	unit	Rusak
Printer	25	unit	Baik

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sarpras/Peralatan	Kondisi 2025	
	Jumlah	Baik/Rusak
Scanner	6 unit	Baik
Televisi	10 unit	Baik
Televisi	1 unit	Rusak
Lemari Besi/Metal	1 unit	Baik
Lemari Kayu	11 unit	Baik
Rak Besi	15 unit	Baik
Rak Kayu	4 unit	Baik
Filing Cabinet	28 unit	Baik
Lemari Kaca	15 unit	Baik
CCTV	8 titik	Baik
White Board	8 unit	Baik
Flip Chart	7 unit	Baik
Focusing Screen/Layar LCD Projector	1 unit	Baik
Papan Tulis	1 unit	Baik
Meja rapat	40 unit	Baik
Meja kerja	66 unit	Baik
Meja eselon	unit	Baik
Kursi rapat	110 unit	Baik
Kursi kerja	130 unit	Baik
Kursi tamu	2 unit	Baik
Kursi eselon	13 unit	Baik
Kulkas	2 unit	Baik
AC	25 unit	Baik
AC	5 unit	Baik
Telepon	3 unit	Baik
Kamera	1 unit	Baik
Server + jaringan	3 unit	Baik

Sumber : Subbag PKU Inspektorat Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.4 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Bahwa dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah terdapat target indikator yang harus dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang. Pencapaian target tersebut akan menggambarkan secara kualitatif bagaimana pelayanan telah dilaksanakan secara maksimal. Target indikator Inspektorat Kabupaten Pemalang dari Tujuan, Sasaran hingga Program serta ketercapaiannya pada 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada Tabel 2.5. Sementara Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dari 5 (lima) tahun terakhir disajikan dalam Tabel 2.6.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun				Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
I	TUJUAN Maturitas SPIP	-	-	-	3,038	3,0385	3,039	3,095	3,04	2,07	2,43	2,94	100%	68%	80%	97%
II	SASARAN Kapabilitas APIP IKM	- -	- -	- -	3 78	3 79	3 80	3 81	3 80,60	2 80,1	2 80	3 82,20	100% 103%	67% 101%	67% 100%	100% 101%
III	PROGRAM **Program Penyelenggaraan Pengawasan** Cakupan penyelenggaraan pengawasan **Program Perumusaan Kebijakaan, Pendampingan dan Asistensi** Cakupan pendampingan dan asistensi	- -	- -	- -	 82 75	 83 80	 85 85	 90 90	 71 84	 83 86	 100 100	 83,02 86,11	 87% 112%	 100% 108%	 118% 118%	 92% 96%

Penjabaran analisis dari tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2024 di atas diuraikan sebagai berikut :

1. Capaian Maturitas SPIP pada tahun 2021 telah sesuai dengan target sebesar 100%. Namun demikian, pada tahun 2022 ditemukan adanya penyimpangan penyimpangan praktek birokrasi di lingkungan kabupaten Pemalang, yang berdampak pada merosotnya level SPIP sampai ke tahun 2023. Di tahun 2024, kondisi pemulihan sudah mulai nampak, meskipun realisasinya masih belum dapat mencapai target yang ditetapkan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2. Demikian pula yang terjadi pada capaian Kapabilitas APIP. Adanya penyimpangan praktek birokrasi kabupaten Pemalang pada tahun 2022 berdampak pada penurunan level Kapabilitas APIP, dimana pada tahun 2021 capaiannya telah sesuai dengan target. Di tahun 2024, kondisi pemulihan sudah mulai nampak, capaian level Kapabilitas APIP telah sesuai dengan target di level 3.
3. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2021-2023 terlihat stabil di angka 80. Faktor pendanaan dan sumber daya manusia sangat mempengaruhi kinerja pelayanan Inspektorat. Pada tahun 2024 terdapat peningkatan anggaran signifikan dibandingkan tahun 2023, yang berdampak pada pemenuhan sarana dan prasarana yang menunjang penyelesaian pekerjaan menjadi lebih maksimal dan meningkatkan kinerja pelayanan pada masyarakat. Kondisi tersebut dapat mendongkrak capaian IKM di tahun 2024 menjadi lebih tinggi diangka 82,20.
4. Capaian indikator Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusaan Kebijakaan, Pendampingan dan Asistensi pada rentang tahun 2021 – 2024 terbilang fluktuatif. Minimnya jumlah SDM yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Pemalang tidak sebanding dengan banyaknya penugasan menjadi faktor dominan yang mempengaruhi capaian indikator program. Penggunaan skala prioritas menjadi alternatif solusi penyelesaian penugasan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara realisasi dan Anggaran Tahun ke -				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja	10.862.132.000	12.303.706.000	13.340.434.000	15.167.463.000	10.638.498.319	12.013.598.043	12.511.619.788	14.041.666.290	97,94%	97,64%	93,79%	92,58%	12%	10%
Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dari Tabel 2.6 di atas terlihat bahwa alokasi anggaran yang dikelola oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang dalam rentang waktu 2021-2024 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Namun peningkatan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai. Adanya kebijakan penguatan APIP daerah yang didukung dengan terbitnya Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, BPKP dan KPK tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah di tahun 2024 berdampak pada peningkatan alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp 15.167.463.000 untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional pengawasan. Namun demikian, peningkatan anggaran di tahun 2024 tersebut masih belum sepenuhnya mengakomodir kebijakan penguatan APIP daerah dan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024 yang mengatur ketentuan alokasi anggaran pengawasan paling sedikit 0,50% atau paling sedikit Rp15 milyar untuk total belanja APBD yang berjumlah lebih dari Rp 2.000.000.000.000,00.

Capaian penyerapan anggaran Inspektorat Kabupaten Pemalang dalam rentang waktu 2021-2024 cenderung fluktuatif. Minimnya jumlah SDM pemeriksa yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Pemalang tidak sebanding dengan banyaknya penugasan menjadi faktor dominan yang mempengaruhi realisasi anggaran. Rasio realisasi terendah terdapat pada tahun 2024. Selain minimnya jumlah SDM pemeriksa, kebijakan penatausahaan keuangan yang berbasis aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang mulai diterapkan pada tahun 2024 turut menyumbangkan kendala dalam upaya penyerapan anggaran Inspektorat Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.5 Permasalahan Pelayanan Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Pemalang merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa serta membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan.

Pemetaan permasalahan pelayanan Inspektorat Kabupatan Pemalang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.7

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Urusan/Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Data Dukung
1.	Implementasi manajemen risiko masih bersifat administratif sehingga belum dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan belum berdampak menurunkan risiko	Belum optimalnya pendampingan dan asistensi kepada instansi yang membutuhkan	Rendahnya budaya sadar risiko serta kurangnya pemahaman ditingkat OPD berdampak pada belum diterapkannya hasil kegiatan pendampingan dan asistensi yang telah diberikan oleh APIP, pada proses bisnis OPD, sehingga belum berdampak pada penurunan risiko.	
2.	Kapabilitas SDM Pengawas masih kurang optimal	Ketersediaan anggaran yang ada belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh SDM pengawas untuk mengikuti diklat peningkatan kapasitas	Banyaknya penugasan mandatory menjadi prioritas untuk diselesaikan dibandingkan mengikuti diklat peningkatan kapasitas	
3.	Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Pemalang belum optimal	Peningkatan pendampingan dan asistensi kepada semua elemen aparatur pemerintah daerah	– Belum profesionalnya aparatur pemerintahan daerah, dukungan peraturan perundangan, serta kesadaran hukum masyarakat – Masih terjadi temuan berulang dan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti	
4.	Penguatan pencegahan anti korupsi di sektor pendidikan, kesehatan,	– Hasil audit kinerja belum dijadikan masukan dan pertimbangan untuk	– Kurang optimalnya sinergitas APIP dengan APH dalam penanganan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

No.	Urusan/Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Data Dukung
	kependudukan, catatan sipil, perijinan dan pemerintahan desa	meningkatkan kinerja, mengurangi risiko dan mencapai tujuan – Optimalisasi sosialisasi anti korupsi dan anti gratifikasi disetiap elemen masyarakat	pengaduan masyarakat dan pelaksanaan pemberantasan pungutan liar di instansi-instansi pelayanan publik menjadi penyebab belum ada sanksi tegas terhadap pelaku gratifikasi dan pungutan liar – Pengelolaan saluran pengaduan belum dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal – Adanya pengaduan masyarakat yang belum ditindaklanjuti	

2.6 Isu Strategis Inspektorat Kabupaten Pemalang

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Inspektorat Kabupaten Pemalang dirumuskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.8

Identifikasi Isu Strategis Inspektorat Kabupaten Pemalang

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	Jumlah SDM APIP menjadi salah satu penyumbang rendahnya capaian Indikator Kapabilitas APIP dan capaian MCP KPK di area Pengawasan	-		Tren nilai Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) menunjukkan	Penguatan kelembagaan APIP dalam pencegahan korupsi dan	Peran dan Kinerja SDM Pengawas terhadap upaya pencegahan korupsi

https://jdih.pemalangkab.go.id

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
				penurunan dari tahun 2023 sampai dengan 2024	pembangunan integritas	
	Kurang optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan intern		Standar Global Internal Audit 2024 menuntut auditor internal untuk menerapkan teknologi informasi dalam audit intern dan kompetensi yang dibutuhkan dalam penerapan teknologi tersebut	APIP membutuhkan dukungan kelembagaan, subtansi, kompetensi, serta regulasi (AAIPI 2024)	Reformasi tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi	Penerapan teknologi informasi (misalnya e-audit) dalam pengawasan intern
	Pemahaman dan komitmen perangkat daerah yang kurang dalam hal menindaklanjuti rekomendasi dan masih terjadinya temuan berulang			Perbaikan mendasar dengan memperkuat sistem pengawasan internal dan internalisasi aturan	Tren nilai SPI dan SPIP-T Kabupaten Pemalang meningkat dari tahun 2023 sampai dengan 2024 tetapi masih	Kurangnya kesadaran akan pentingnya integritas dan budaya anti korupsi Peningkatan peran Inspektorat sebagai *early warning system* dalam

https://jdih.pemalangkab.go.id

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
				pengelolaan benturan kepentingan dan hukuman/sanksi (Laporan SPI 2024)	ditemukan adanya temuan berulang	mendeteksi penyimpangan
	– Anggaran pengawasan belum memenuhi SE Bersama Mendagri+BPKP+KPK tentang Penguatan APIP Daerah dan menjadi salah satu penyumbang rendahnya capaian Indikator Kapabilitas APIP dan capaian MCP KPK di area Pengawasan – Kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan sangat mendesak			APIP membutuhkan dukungan kelembagaan, subtansi, kompetensi, serta regulasi (AAIPI 2024)		Penguatan kelembagaan APIP dalam pencegahan korupsi dan pembangunan integritas

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Inspektorat Kabupaten Pemalang dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan mampu bersaing di bidang pembinaan dan pengawasan, maka Inspektorat Kabupaten Pemalang harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan komprehensif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja. Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pembinaan dan pengawasan, Inspektorat Kabupaten Pemalang secara proaktif berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan birokrasi yang akuntabel.

3.1.1 Tujuan

Inspektorat Kabupaten Pemalang mempunyai 1 (satu) sasaran jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2025–2029, yaitu "**Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel**" yang diukur dengan indikator Indeks Integritas Nasional berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas yang dilaksanakan setiap tahun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).

3.1.2 Sasaran

Inspektorat Kabupaten Pemalang mempunyai 1 (satu) sasaran jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2025–2029, yaitu "**Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik**" yang diukur dengan indikator nilai Kapabilitas APIP yang merupakan hasil evaluasi oleh BPKP terhadap kualitas dari Sistem Pengendalian Intern Organisasi.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kabupaten Pemalang dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai diuraikan dalam tabel berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Pemalang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel		Indeks Integritas Nasional	Indeks	68,34	69,09	69,97	71	72	73	74,20	74,50	74,5
2.		Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien dengan pelayanan publik yang baik	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	2	3	3	3	3	3	3	3	3

https://jdih.pemalangkab.go.id

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang sistematis yang dilaksanakan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, sedangkan arah kebijakan diartikan sebagai tindakan secara operasional dari pimpinan instansi untuk melaksanakan strategi sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pemalang periode 2025 - 2029, maka telah dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Pemalang Mulya (Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya)			
Misi ke 6 : Organisatoris Meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik	1. Peningkatan akuntabilitas pembangunan melalui peningkatan kualitas perencanaan, kinerja dan pelaporan 2. Peningkatan maturitas sistem pengendalian intern melalui peningkatan komitmen pemerintah dalam menjalankan pembangunan, penguatan kebijakan dan regulasi, peningkatan kapabilitas APIP, peningkatan kualitas dan profesionalisme pegawai, penguatan manajemen resiko, digitalisasi, serta evaluasi berkelanjutan	1. Peningkatan kualitas pengawasan difokuskan pada pencapaian maturitas dan kapasitas APIP serta mitigasi risiko 2. Peningkatan kapasitas pegawai dengan fokus pendidikan dan pelatihan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Inspektorat telah melaksanakan urusan pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan yang akan terus ditingkatkan, antara lain :

a. Kegiatan Pemberian Keyakinan (*Assurance Activities*) : Audit (Audit Keuangan, Audit Kinerja dan Audit dengan tujuan tertentu), Evaluasi, Reviu dan Pemantauan;
b. Kegiatan Pengawasan lainnya dan kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas : Konsultasi, Sosialisasi dan Asistensi.

Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, Inspektorat menyusun kebijakan teknis pengawasan berupa dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang dilakukan setiap tahun yang merujuk pada Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko (PPBR) dan berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kualitas SDM aparatur pengawas yang ada sudah cukup baik dilihat dari tingkat pendidikan formal dan penjenjangan auditor. Namun demikian meskipun pada tahun 2025 telah ada penambahan 40 orang tenaga pemeriksa, jumlah tersebut masih belum memenuhi kebutuhan tenaga pemeriksa sesuai persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebanyak 104 orang, sehingga dimasa yang akan datang masih dibutuhkan 39 orang tenaga pemeriksa. Demikian pula dengan adanya berbagai aturan/regulasi yang baru sehingga sangat perlu dilakukan peningkatan kompetensi/kapasitas melalui pendidikan/pelatihan bidang pengawasan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Kabupaten Pemalang yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026 :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
      b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD;
      c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
      d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
      e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD;
      f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
      b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
      c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
   3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
      b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
   4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
      b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
      c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
      d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
      e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
      f. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
   5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id

a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
b. Sub kegiatan Pengadaan Mebel;
c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   c. Sub Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan;
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel;
   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

B. Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal
1. Kegiatan Pengawasan Internal
   a. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
   b. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
   c. Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja;
   d. Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan;
   e. Sub kegiatan Pengawasan Desa
   f. Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal;
   g. Sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
   a. Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
   b. Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

C. Program Perumusan Kebijakan teknis, Pendampingan dan Asistensi
1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
   a. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.
2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
   a. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
   b. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
   c. Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
   d. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan selama periode tahun 2025 – 2029, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Inspektorat Kabupaten Pemalang dalam menyusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan ini telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Inspektorat Kabupaten Pemalang selama tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada Tabel 4.1:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029

Tujuan	Sasaran	Output/ Outcome	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel				Indeks Integritas Nasional	Indeks	**69,09**	**71**	-	**72**	-	**73**	-	**74,20**	-	**74,50**	-	**INSPEKTORAT**	**KAB. PEMALANG**
	Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik			Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	**3**	**3**		**3**		**3**		**3**		**3**		**INSPEKTORAT**	**KAB. PEMALANG**
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase PKPT Pengawasan yang direalisasi	%	90												
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal															
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah yang terselenggara	Laporan	11												

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Output/ Outcome	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintahan daerah yang terselenggara	Laporan	3												
			Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja yang terselenggara	Laporan	7												
			Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan yang terselenggara	Laporan	44												
			Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa yang terselenggara	Laporan	9												
			Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal	Laporan	14												
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu															
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan hasil audit kerugian negara/ daerah dan laporan audit PKKN yang ditangani	Laporan	5												
			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang terselenggara	Laporan	2												
		Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi dalam perumusan	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1. Persentase komulatif Perangkat Daerah yang difasilitasi Penyelenggaraan Manajemen Resiko/SPIP/	%	100												

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Output/ Outcome	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		kebijakan daerah		Pengendalian Korupsi 2. Persentase Asistensi/Pendampingan Tematik Penyelenggaraan Pemerintah Desa														
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan															
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis pengawasan yang terumuskan	Dokumen	3												
			Pendampingan dan Asistensi															
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	Laporan	5												
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan pendampingan asistensi dan PMPRB yang dihasilkan	Laporan	26												
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Laporan	14												
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Laporan	41												

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Output/ Outcome	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Meningkatnya kualitas akuntabilitas perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	skor	65,43												
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	3												
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Dokumen	2												
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1												
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1												

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Output/ Outcome	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	Laporan	4												
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Laporan	2												
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
			Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan	Bulan	14												
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	Laporan	1												
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ semesteran/ triwulan SKPD yang tersusun	Laporan	12												
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan	Orang	17												
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis	Orang	74												
			Administrasi Umum Perangkat Daerah															

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Output/ Outcome	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Laporan	12												
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	Laporan	12												
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang tersedia	Laporan	12												
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jenis surat kabar yang tersedia	Laporan	12												
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	12												
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis SKPD yang tertata	Laporan	12												
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4												
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	77												
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	14												

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Output/ Outcome	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12												
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12												
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	2												
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12												
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara	Unit	29												
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	Unit	41												
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Unit	97												

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Output/ Outcome	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	12												

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable)* mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Pemalang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pemalang yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	*Baseline* Tahun		Target Capaian Tahun						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	TUJUAN									
1.	Indeks Integritas Nasional	68,34	69,09	69,97	71	72	73	74,2	74,5	74,5
	SASARAN									
1.	Level Kapabilitas APIP	2	3	3	3	3	3	3	3	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pada tabel 4.2 di atas dapat dijelaskan bahwa Inspektorat Kabupaten Pemalang pada tahun 2025 – 2029 mempunyai 1 (satu) indikator kinerja kunci pada tingkat tujuan dan 1 (satu) indikator kinerja kunci pada tingkat sasaran yang nantinya akan mendukung sasaran pemerintah Kabupaten Pemalang yaitu pada sasaran ke 2 yaitu "Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik".

Selain Indikator Kinerja kunci (IKK) perangkat daerah, juga ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Pemalang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang Dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Pemalang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Utama	*Baseline* Tahun		Target Capaian Tahun						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Maturitas SPIP	2,43	2,94	3,00	3,05	3,15	3,20	3,25	3,30	
2.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	82,20	82,90	83,25	83,90	84,25	83,90	84,25	
4.	Nilai SAKIP	64,85	65,49							

Pada tabel 4.3 menjelaskan bahwa Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 sebagai suatu dokumen perencanaan strategis dan menjadi acuan bagi perencanaan kinerja tahunan mulai dari Tahun 2025 sampai dengan 2029.

Inspektorat Kabupaten Pemalang akan melakukan upaya optimal untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Pemalang melalui pelaksanaan program, kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Melalui rumusan Rencana Strategis ini Inspektorat Kabupaten Pemalang telah mempersiapkan diri untuk berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

SDM Inspektorat Kabupaten Pemalang dituntut untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya agar dapat mengemban tugas pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini guna menunjang terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik.

Demikian, semoga dokumen ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB I
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pendididikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang bersifat strategis dan disusun sebagai pedoman dalam merumuskan arah kebijakan, program, dan kegiatan selama periode lima tahun ke depan. Dokumen ini mencerminkan komitmen untuk mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan relevan dengan kebutuhan zaman, serta merupakan upaya strategis dalam pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berakhlak mulia, serta upaya dalam pelestarian, penguatan, dan pengembangan nilai-nilai budaya bangsa.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang sebagaimana dikemukakan dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berperan aktif dalam mendukung dan mensukseskan tercapainya Visi Kabupaten Pemalang yaitu Pemalang **BERCAHAYA** yaitu **Bersih, Cakap, Handal dan Mulya** dengan misi **RHAPSODI (Resik, Hijau, Apik, Peduli, Silaturahmi, Organisatoris, Digitalisasi dan Ikhlas)** dan agenda pembangunan daerah sesuai kewenangan dalam pembangunan bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang bersifat strategis bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Pemalang.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 UU Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa pendidikan merupakan pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangan menyelenggarakan pendidikan dasar yaitu: (1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); (2) Pendidikan Dasar dan (3) Pendidikan Kesetaraan. Sebagai urusan kewenangan dasar pendidikan, maka wajib melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM) berdasarkan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan yang mentargetkan semua indikator tercapai 100% (seratus persen). SPM Pendidikan harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id

sesuai kewenangannya adalah Pemenuhan SPM pada (1) Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); (2) Pendidikan Dasar dan (3) Pendidikan Kesetaraan. Sedangkan urusan kebudayaan meliputi kewenangan tentang sub urusan kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah dan cagar budaya daerah yang sangat penting dalam melestarikan jatidiri masyarakat.

Tantangan dalam pembangunan Pendidikan di Kabupaten Pemalang antara lain Belum optimalnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang (tahun 2024) sebesar 68,08 lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,88. Indikator komposit bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah masih rendahnya Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (2024) sebesar 6,56 tahun (setara dengan lulus sekolah dasar/sederajat) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Pemalang sebesar 12,02 tahun, masih lebih rendah (dibandingkan Jawa Tengah sebesar 12,86 tahun). Masalah lainnya adalah belum semua anak usia sekolah (5-6 tahun dan 7-18 tahun) mendapatkan pelayanan Pendidikan formal atau Pendidikan non formal (Pendidikan Kesetaraaan) secara maksimal.

Kewajiban memenuhi capaian standar Pendidikan minimal (SPM) Pendidikan juga masih belum optimal. Capaian tahun 2024, pada Angka Partisipasi Sekolah (APS) belum dapat tercapai 100%. Capaian Angka APS PAUD (sebesar 84,39%), APS SD mencapai 99,07% dan Angka Partisipasi Sekolah SMP mencapai 93,04%.

Sedangkan permasalahan pembangunan pendidikan antara lain adalah belum optimalnya pelayanan Pendidikan penduduk usia sekolah (6 – 15 tahun) secara merata, pelaksanaan operasional sekolah dari dana BOS dan alokasi DAK Fisik untuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan belum tercukupi, tenaga pendidik PAUD belum sesuai standar, tenaga kependidikan di tingkat Pendidikan Dasar belum memadai.

Pandemi Covid-19 tahun memberikan dampak yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Beragam permasalahan pasca Covid 19, baik masalah kesehatan, sosial ekonomi dan ketenagakerjaaan yang mengakibatkan meningkatnya penduduk miskin dan turunnya daya beli masyarakat, sehingga banyak anak usia sekolah tidak dapat bersekolah atau mengalami putus sekolah karena masalah ekonomi. Permasalahan lainnya adalah proses pembelajaran beralih dari tatap muka ke

https://jdih.pemalangkab.go.id
Pemerintah Kabupaten Pemalang

daring (*online*) menjadi problem karena tidak semua siswa dan guru siap atau memiliki akses terhadap perangkat teknologi dan internet, termasuk Kabupaten Pemalang. Kondisi tersebut menyebabkan proses pembelajaran tidak maksimal, sehingga target capaian yang sudah ditetapkan tidak bisa tercapai, utamanya pada aspek mutu pendidikan.

Peningkatan manajemen pendidikan, pengelolan keuangan, dana BOS dan dana APBD agar lebih efektif dan efisien, serta pelaporan yang tepat waktu. Kelengkapan data Pendidikan yang valid dan terverifikasi akan memudahkan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang melaksanakan kebijakan dan strategi, program dan kegiatan tepat sasaran. Diharapkan pemenuhan SPM Pendidikan dapat tercapai 100% pada akhir perencanaan. Pembangunan Pendidikan dengan mewujudkan seluruh anak wajib Pendidikan menempuh Pendidikan sesuai dengan Program Wajib Belajar menuju 13 tahun, dari jenjang PAUD sampai SMA. Kebijakan ini memerlukan komitmen dan dukungan segenap perangkat daerah, pemangku kepentingan pembangunan pendidikan melalui kerjasama multi sektoral secara berkelanjutan sehingga harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pemalang semakin baik di tahun-tahun mendatang.

Pembangunan Pendidikan harus mendapatkan prioritas penting dalam rangka meningkatkan tata kelola pembangunan pendidikan secara baik, menjangkau seluruh anak usia sekolah dan tercapainya target SPM pendidikan secara umum. Sebagai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pendidikan memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, berkomitmen untuk memastikan seluruh penduduk, terutama anak usia sekolah, mendapatkan hak atas layanan pendidikan yang bermutu, adil, dan merata.

Salah satu acuan utama dalam penyusunan Renstra ini adalah upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pemenuhan SPM Pendidikan. Target capaian SPM di akhir periode Renstra 2029 diharapkan dapat memenuhi 100% layanan dasar pendidikan, termasuk peningkatan rasio peserta didik terhadap guru yang ideal, sarana dan prasarana yang memadai, serta peningkatan mutu pembelajaran. Pemenuhan SPM ini bukan hanya sekadar

https://jdih.pemalangkab.go.id
Pemerintah Kabupaten Pemalang

pemenuhan administratif, tetapi sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan setiap warga negara.

Penyusunan Renstra Dinas Pendididikan dan Kebudayaan harus sinergis dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Pemalang, arahan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kebijakan dari Pusat yaitu berdasarkan telaah Renstra Kementerian/Lembaga serta dokumen perencanaan pembangunan yang terkait. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Tahun 2025–2029 ini bertujuan untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan pendidikan daerah dalam lima tahun ke depan, dengan mengintegrasikan visi-misi kepala daerah, kebijakan nasional, dan prioritas pembangunan berbasis data. Dalam konteks ini, Renstra disusun sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja Dinas Pendidikan secara sistematis dan terukur. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan pendididkan dan kebudayaan Kabupaten Pemalang tahun 2025 – 2029 memerlukan dukungan dari segenap perangkat daerah dan pemangku kepentingan pembangunan daerah.

Renstra juga memuat evaluasi capaian Renstra sebelumnya, analisis kondisi lingkungan internal dan eksternal, serta permasalahan strategis yang dihadapi dunia pendidikan di Kabupaten Pemalang. Fokus utama lainnya dalam lima tahun ke depan mencakup penguatan tata kelola pendidikan, transformasi digital sekolah, pendidikan inklusif, peningkatan mutu pendidikan dan sekolah tangguh bencana, serta perluasan kerja sama lintas sektor. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya menjadi panduan teknokratis internal Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, tetapi juga alat akuntabilitas kepada publik dan pemangku kepentingan pendidikan. Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, masyarakat, dan dunia usaha menjadi kunci keberhasilan transformasi pendidikan yang berorientasi pada pemenuhan layanan dasar dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang 2025-2029, menggunakan landasan hukum sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

https://jdih.pemalangkab.go.id

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi JawaTengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang

https://jdih.pemalangkab.go.id

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
22. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang;
23. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepemudaan;
26. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Kabupaten Pemalang tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah ini adalah memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen perilaku

https://jdih.pemalangkab.go.id

pembangunan di Kabupaten Pemalang khususnya dalam melaksanakan urusan kewajiban pemerintah di bidang pendidkan dan kebudayaan, sebagai bagian integral dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya, sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah disepakati bersama.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah :

a. Menjadi acuan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam penyusunan rencana kerja (RENJA) Perangkat Daerah;
b. Menjadi acuan dalam menentukan prioritas pembangunan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selama kurun waktu 5 tahun ke depan (2025-2029);
c. Menjadi tolok ukur dalam evaluasi terhadap kinerja pembangunan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
d. Menjabarkan kondisi umum Pendidikan, Pemuda dan Olahraga saat ini, sekaligus memahami visi, misi, arah dan tujuan pembangunan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Pemalang;
e. Memudahkan bagi jajaran Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun progam dan kegiatan agar dapat dilaksanakan secara terpadu, terarah dan terukur;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Raga Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berkut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penyusun renstra, maksud dan tujuan, landasan dan hukum dan sistematika penulisan renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang

https://jdih.pemalangkab.go.id

pengembangan pelayanan pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Menjelaskan tentang permasalahan pendidikan pemuda dan olahraga yang ada di Kabupaten Pemalang, telaah visi, misi dan progam kepala daerah, telaah renstra kementrian dan kelembagaan terbaik, telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hudup strategis dan penentuan isu strategis bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Menjabarkan Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang yang akan dicapai selama tahun 2025-2029

BAB II RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Menjabarkan tentang progam, kegiatan, indikator kerja, kelompok sasaran dan penadaan indikatif selama kurun waktu lima tahun kedepan (2025-2029).

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Menjabarkan tentang Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD selama kurun waktu lima tahun kedepan (2025-2029).

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB II

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kewenangan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Pelaksanaan Tugas Pokok Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pemalang dilaksanakan oleh masing-masing Bidang dan Sekretariat. Secara terperinci tugas dan fungsi tersebut dikelompokkan menjadi :

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

   Fungsi :

   1) perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama, pengelolaan pendidikan anak usia dini, pengelolaan pendidikan nonformal / kesetaraan, pengembangan kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan serta pemuda dan olahraga;
   2) pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama, pengelolaan pendidikan anak usia dini, pengelolaan pendidikan nonformal / kesetaraan, pengembangan kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan serta pemuda dan olahraga;
   3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang di bidang pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama, pengelolaan pendidikan anak usia dini, pengelolaan pendidikan nonformal / kesetaraan, pengembangan kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan serta pemuda dan olahraga;

https://jdih.pemalangkab.go.id

4) pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas :

1) menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang pemuda dan olahraga dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2) merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).
3) merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
4) mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang pendidikan dan bidang pemuda dan olahraga
5) mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, bidang Pemuda dan Olahraga.
6) mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang pendidikan Pemuda dan Olahraga sesuai dengan unsur SPIP.
7) mengarahkan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
8) merumuskan inovasi daerah urusan pemerintahan bidang Pendidikan, bidang Pemuda dan Olahraga.
9) mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, pemuda dan olahraga.
10) merumuskan laporan di bidang pendidikan Pemuda dan Olahraga.

https://jdih.pemalangkab.go.id

11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sekretaris

Fungsi :

1) penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dindikpora;
2) penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dindikpora;
3) penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dindikpora;
4) penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dindikpora;
5) penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
6) penyiapan pengelolaan barang milik/ kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Dindikpora;
7) penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dindikpora; dan
8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas :

1) merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan.
2) mengoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
3) menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan.
4) menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengelolaan dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kedinasan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggan, barang milik daerah, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dokumentasi dan pengadaan barang/ jasa.
5) menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian.

https://jdih.pemalangkab.go.id

6) menyelenggarakan kegiatan bidang bina program yang meliputi penyusunan usulan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), pengelolaan administrasi di bidang bina program, pengelolaan data urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang pemuda dan olahraga, penyusunan konsep dokumen pertanggungjawaban kinerja yang meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dokumen pertanggungjawaban lainnya.
7) mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik.
8) menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pemuda dan olahraga sesuai dengan unsur SPIP.
9) menyusun konsep inovasi kesekretariatan.
10) mengoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang-bidang.
11) mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan.
12) mengoordinasikan penyusunan laporan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pemuda dan olahraga.
13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Dasar

Fungsi:

1) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sekolah dasar dan
2) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas:

1) mengoordinasikan peyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Pendidikan Dasar berdasarkan dokumen rencana kerja organisasi perangkat daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2) menyusun rancangan kebijakan Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar.
3) merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar.
4) menyelenggarakan program dan kegiatan pengelolaan Pendidikan sekolah dasar dan pengendalian perizinan Pendidikan;
5) menyusun konsep inovasi Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar.
6) mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar.
7) mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar.
8) menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar.
9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Fungsi;

1) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan Pendidikan sekolah menengah pertama;
2) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas:

1) mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama berdasarkan dokumen rencana kerja organisasi perangkat daerah.
2) menyusun rancangan kebijakan Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
3) merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah tingkat pertama;

https://jdih.pemalangkab.go.id

4) menyelenggarakan program dan kegiatan pengelolaan Pendidikan sekolah menengah pertama
5) menyusun konsep inovasi Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
6) mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
7) mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
8) menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan

Fungsi:

1) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal/kesetaraan; dan;
2) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Uraian Tugas:

1) mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan.
2) menyusun rancangan kebijakan bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal/kesetaraan.
3) merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal/kesetaraan.
4) menyelenggarakan program dan kegiatan pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan non formal/kesetaraan;
5) menyusun konsep inovasi Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

6) mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan.
7) mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan.
8) menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan.
9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Fungsi:

1) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bidang pengembangan kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan; dan
2) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas:

1) mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pengembangan Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2) menyusun rancangan kebijakan Bidang Pengembangan Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3) merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan;
4) menyelenggarakan program Pengembangan Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
5) menyusun konsep inovasi pada Bidang Pengembangan Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6) mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengembangan Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan
7) mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Pengembangan Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan

https://jdih.pemalangkab.go.id

8) menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengembangan Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga

Fungsi:

1) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bidang pemuda dan olahraga; dan
2) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas:

1) mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan bidang pemuda dan olahraga;
2) menyusun rancangan kebijakan Bidang Pemuda Dan Olahraga;
3) merumuskan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga;
4) menyelenggarakan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan yang meliputi kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota; Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
5) menyelenggarakan program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan yang meliputi kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi; Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga; Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi; Pembinaan dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

6) menyelenggarakan program pengembangan kapasitas kepramukaan yang meliputi kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.
7) menyusun konsep inovasi pada Bidang Pemuda Dan Olahraga;
8) mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Pemuda Dan Olahraga;
9) mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Pemuda Dan Olahraga;
10) menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pemuda Dan Olahraga;
11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

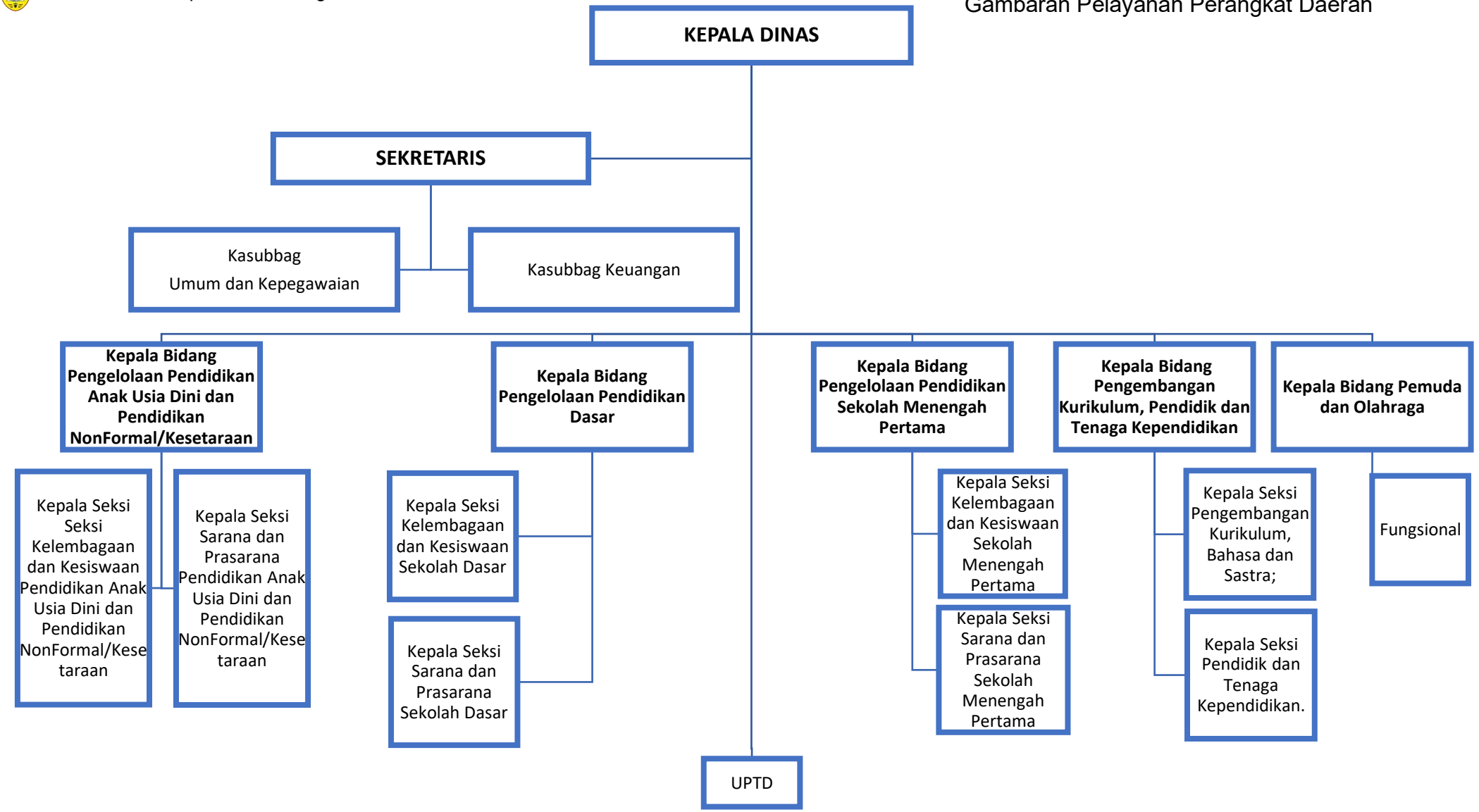

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.1 Sumber Daya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya dalam bentuk sarana dan prasrana yang menunjang kinerja sehingga tercapai Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 khususnya pada urusan bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Keadaan Personil Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

1) Personil Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten :

a. Kepala Dinas (eselon II b)	=	1 orang
b. Sekretaris Dinas (eselon III a)	=	1 orang
c. Kepala Bidang (eselon III b)	=	5 orang
d. Ka. Sub Bag /Kasi (eselon IV a)	=	13 orang
e. Pengawas SLTP	=	orang
f. Staf Administrasi	=	54 orang
Jumlah	**=**	**69 orang**

2) Personil Koordinator Wilayah Kecamatan (KWK) :

a. Kepala KWK (eselon IV a)	=	14 orang
b. Pengawas TK/SD (Jab. Fungsional)	=	16 orang
c. Staf Administrasi KWK	=	41 orang
Jumlah	**=**	**71 orang**

3) Personil sekolah :

a. PAUD :

- Kepala PAUD	=	678 orang
- Guru PAUD	=	1.691 orang
- Tenaga Kependidikan PAUD	=	125 orang
Jumlah	**=**	**2.494 orang**

b. Sekolah Dasar :

- Kepala SD	=	584 orang
- Guru SD	=	4.917 orang
- Tenaga Kependidikan SD	=	638 orang
Jumlah	**=**	**6.139 orang**

https://jdih.pemalangkab.go.id

c. SMP :

- Kepala SMP	=	100 orang
- Guru SMP	=	2.386 orang
- Tenaga Kependidikan SMP	=	581 orang
Jumlah	**=**	**3067 orang**

d. Tenaga Wiyata Bhakti :

- Tenaga Kontrak Dindikbud Kab. Pemalang	=	64 orang
- Wiyata Bhakti UPPK	=	53 orang
Jumlah	**=**	**117 orang**

2.2.2 Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahragaKabupaten Pemalang, dikemukakan sebagai berikut :

No	Nama Kantor	Jumlah (unit)	Alamat	Luas m2
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1	Jl. Merbabu No. 2 Pemalang	2.152
2	KWK Ulujami	1	Jl. Raya Ulujami	261
3	KWK Comal	1	Jl. Gatot Subroto No. 2 Comal	395
4	KWK Bodeh	1	Ds. Kebandaran Bodeh	590
5	KWK Ampelgading	1	Jl. Raya Ampelgading	700
6	KWK Petarukan	1	Jl. Raya Petarukan Barat	400
7	KWK Taman	1	Jl. Kolonel Sugiono No. 1	308,7
8	KWK Pemalang	1	Jl. Tentara Pelajar No. 1	528
9	KWK Bantarbolang	1	Jl. Raya Bantarbolang	289
10	KWK Randudongkal	1	Jl. Raya RandudongkalKm 1	535
11	KWK Moga	1	Jl. Bahagia No. 7 Moga	208
12	KWK Watukumpul	1	Jl. Raya Watukumpul 59	963
13	KWK Pulosari	1	Jl. Raya Pulosari MogaKm 6	2.510

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Nama Kantor	Jumlah (unit)	Alamat	Luas m2
14	KWK Belik	1	Jl. Serka Marmir Tolus Ujianto No. 23 Belik	521
15	KWK Warungpring	1	Jl. Raya Warungpring-Pekembaran	1.000
16	SKB Comal	1	Jl. Raya Sidorejo-Comal	23.660
17	Rumah Dinas	1	Jl. Raya Muria-Pemalang	258

2.2.2 Sarana Prasarana Pendukung

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang didukung oleh sarana dan prasarana. Dengan adanya sarana dan prasarana diharapkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebuyaaan Kabupaten Pemalang dapat berjalan dengan baik yang mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan serta terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan. Tabel Sarana Prasarana Pendukung Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pemalang terdiri dari:

Sarana Prasarana Pendukung		**Jumlah**
a. Mobil	=	12 unit
b. Sepeda Motor	=	50 unit
c. Laptop	=	85 unit
d. LCD Projector	=	6 buah
e. Pesawat Telepon	=	2 buah
f. Fax Miles	=	1 buah
g. Kamera	=	4 unit

Sarana dan prasarana Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, keadaan Guru,

https://jdih.pemalangkab.go.id

Murid, Benda Cagar Budaya dan kelompok kesenian di Kabupaten Pemalang secara relative dalam konsisi baik dan dapat dipergunakan untuk proses pembelajaran dan pelayanan kepada masyarakat. Gambaran jumlah sekolah, murid dan guru, dikemukakan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Sekolah Murid dan Guru di Kab. Pemalang Tahun 2025

Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
PAUD	439	16.032	1.295
TK	358	18.378	1.199
SD Negeri	708	121.515	5.798
SD Swasta	34	6.690	341
SMP Negeri	66	42.125	2.464
SMP Swasta	56	9.222	603
Kesetaraan	16	5.463	222
J U M L A H	1.677	219.425	11.922

Cutoff Dapodik 31 Agustus 2024

Tabel 2.2

Kondisi Ruang Kelas di Kab. Pemalang Tahun 2025

No.	Kecamatan	TK			SD			SMP		
		B	RR	RB	B	RR	RB	B	RR	RB
1	Kec. Ampelgading	90	41	2	83	151	26	14	80	2
2	Kec. Bantarbolang	22	53	0	87	168	26	13	77	12
3	Kec. Belik	58	73	3	123	204	29	13	76	8
4	Kec. Bodeh	41	59	2	81	116	22	58	16	0
5	Kec. Comal	91	76	6	134	245	14	33	99	13
6	Kec. Moga	57	40	3	71	151	27	45	34	5
7	Kec. Pemalang	146	143	4	264	405	57	118	180	4
8	Kec. Petarukan	106	88	1	159	304	44	126	64	5
9	Kec. Pulosari	35	39	3	26	149	28	14	38	6

https://jdih.pemalangkab.go.id

No.	Kecamatan	TK			SD			SMP		
		B	RR	RB	B	RR	RB	B	RR	RB
10	Kec. Randudongkal	43	82	2	114	212	32	43	100	1
11	Kec. Taman	120	113	7	242	268	38	102	100	7
12	Kec. Ulujami	58	113	2	53	250	34	63	35	35
13	Kec. Warungpring	39	26	2	35	83	22	17	31	8
14	Kec. Watukumpul	34	39	2	86	170	30	5	48	0
Jumlah		940	985	39	1.558	2.876	429	664	978	106

Cutoff Dapodik 31 Agustus 2024

2.2 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

2.3.1 Pelayanan Pendidikan

Perincian urusan kewenangan pendidikan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diserahkan pengelolaan Pendidikan, sebagai sebagai berikut:

1. Pengelolaan pendidikan dasar.
2. Pengelolaan pendidikan usia dini dan pendidikan non formal;
3. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, Pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
4. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/ kota;
5. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
6. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
7. Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/ kota.

2.3.2 Pelayanan Pemuda dan Olahraga

Perincian urusan Pemuda dan Olahraga dinyatakan sebagai berikut:

1. Pembinaan pemuda pelopor;
2. Pengembangan organisasi kepemudaan;
3. Fasilitasi partisipasi pemuda dalam pembangunan;

https://jdih.pemalangkab.go.id

4. Pembinaan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan;
5. Penyelenggaraan kompetisi olahraga;
6. Pengembangan sarana dan prasarana olahraga;

Berdasarkan perincian kewenangan tersebut maka dapat dikemukakan kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun 2025-2029 dapat disajikan dalam tabel, sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Renstra Pada Tahun					Realisasi Renstra Pada Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan		Rata-Rata Lama sekolah	Tahun	6,5	6,7	6,9	7,1	7,3	6,45	6,5	6,55	6,56		99,23	97,01	94,93	92,39	0,00
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	12	12,1	12,2	12,3	12,4	11,96	11,98	12,01	12,02		99,67	99,01	98,44	97,72	0,00
		Meningkatnya partisipasi sekolah masyarakat	Angka Partisipasi Sekolah PAUD	%	100	100	100	100	100	Na	65,48	53,43	71,45		Na	65,48	53,43	71,45	0,00
			Angka Partisipasi Sekolah dasar	%	100	100	100	100	100	Na	82,29	99,07	94,49		Na	82,29	99,07	94,49	0,00
			Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama	%	100	100	100	100	100	Na	67,77	82,92	83,58		Na	67,77	82,92	83,58	0,00
			Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan	%	100	100	100	100	100	Na	6,77	11,98	21,39		Na	6,77	11,98	21,39	0,00
			Sekolah Terakreditasi	%	100	100	100	100	100	98,84	96,49	96,49	96,49		98,84	96,49	96,49	96,49	0,00
			Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,02	0,04	0,07	0,08	0,09	0	0,05	0,02	0,03		Na	125,00	28,57	37,50	0,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Renstra Pada Tahun					Realisasi Renstra Pada Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	29,04	30,01	30,98	48,8	32,92	0	50,84	48,75	48,51		Na	169,41	157,36	99,41	0,00
			Persentase wirausaha pemula	%	38,89	53,57	83,33	97	88,1	0	0	96,87	16,95		Na	0,00	116,25	17,47	0,00
			Persentase peningkatan prestasi olahraga	%	Na	42,85	50	33,33	25	Na	1500	0	22,92		Na	3500,58	0,00	68,77	0,00
			Jumlah perolehan medali pada even olahraga tingkat regional/nasional	Medali	7	10	15	49	25	9	48	48	59		128,57	480,00	320,00	120,41	0,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kinerja pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang perlu dianalisa untuk dapat menunjukkan seberapa besar perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, seberapa kuat daya dukung sumber daya perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, tingkat ketercapaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan.

Berdasarkan data yang telah ditunjukkan pada tabel di atas maka diketahui capaian kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagai berikut :

Keterangan Tabel 2.3

a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mengampu 2 (dua) urusan yaitu Urusan Pendidikan dengan Tujuan Meningkatkan Kualitas Pendidikan, dan Urusan Pemuda dan Olahraga dengan Tujuan Meningkatkan Partisipasi Pemuda dan Prestasi Olahraga.
b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Memiliki 12 (dua belas) Indikator yang terdiri dari 7 (tujuh) indikator pada Urusan Pendidikan dan 5 (lima) Indikator pada urusan Kebudayaan. Semua indikator tersebut menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK), sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
c. Sejak tahun 2021 sampai tahun 2024, Indikator pada urusan pendidikan (7 indikator) **belum mencapai target** yang telah ditetapkan, sedangkan capaian pada urusan kebudayaan, 2 (dua) indikator tujuan/sasaran telah melampaui target yang telah ditetapkan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

(Dalam Ribuan Rupiah)

No	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	721.698.040	725.937.145	782.527.699	922.117.392	874.813.906	684.063.345	682.225.953	691.190.824	819.365.729	302.296.147	94,8	94,0	88,3	88,9	34,6	805.418.836	635.828.400
2	Program Pengelolaan Pendidikan	262.726.087	238.208.544	323.885.043	295.617.945	265.017.044	251.907.941	225.932.802	314.617.382	285.749.259	1.429.486	95,9	94,8	97,1	96,7	0,5	277.090.933	215.927.374
3	Program Pengembangan Kurikulum	184.789	170.288	2.470.186	1.500.000	132.075	184.650	170.288	1.604.183	1.219.426	00	99,9	100,0	64,9	81,3	0,0	891.468	635.709
4	Program Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	254.750	289.750	900.000	800.000	430.063	238.794	282.931	760.138	790.440	00	93,7	97,6	84,5	98,8	0,0	534.913	414.461
5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.053.200	1.053.200	1.053.200	1.053.200		226.979	384.836	287.425	646.312		21,6	36,5	27,3	61,4	0,0	1.053.200	386.388
6	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	6.316.800	6.316.800	6.316.800	6.316.800		2.681.404	2.602.322	7.762.036	157.158		42,4	41,2	122,9	2,5	0,0	6.316.800	3.300.730
7	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	300.000	300.000	300.000	300.000		100.000	250.000	650.000	364.850		33,3	83,3	216,7	121,6	0,0	300.000	341.213

Catatan Realisasi TA 2025 Hingga TW II

https://jdih.pemalangkab.go.id

Berdasarkan rincian yang telah dikemukakan pada Tabel 2.3 dan 2.4 di atas maka diketahui capaian kinerja dan realisasi anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang dari tahun 2021 sampai dengan 2026 menunjukkan bahwa capaian kinerja urusan pendidikan walaupun belum signifikan dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun sebelumnya. Di sisi lain, realisasi anggaran terjadi peningkatan walaupun anggaran dari tahun 2021 sampai 2026 cukup fluktuatif. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembangunan bidang pendidikan serta terus dapat memberikan kinerja pelayanan yang semakin baik.

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan pendidikan di Kabupaten Pemalang adalah indikator komposit pendidikan yaitu harapan Lama Sekolah (HLS) dan rata-rata Lamanya Sekolah (RLS) yang merupakan unsur penyusun Indeks Pendidikan Manusia (IPM). Kondisi Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-Rata Lamanya Sekolah di Kabupaten Pemalang selama tahun 2021-2024 sebagai berikut:

1. **Angka Harapan Lama Sekolah**

   Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dihitung terhadap penduduk usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Angka HLS di Kabupaten Pemalang sepanjang tahun 2021 sampai 2024 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pemalang sebesar 11,96 dan pada tahun 2024 sebesar 12,02, dan capaian ini tidak memenuhi target RPJMD tahun 2021-2024 yaitu 12 tahun 2021 dan 12,30 pada tahun 2024. Namun demikina, kondisi ini menggambarkan bahwa warga peserta didik di Kabupaten Pemalang memiliki harapan untuk menempuh jenjang pendidikannya selama 12 Tahun lebih. Dengan kata lain,

https://jdih.pemalangkab.go.id

harapan untuk pelaksanaan wajib belajar 12 Tahun (sampai jenjang SMA) di Kabupaten Pemalang dapat terwujud. Ada beberapa faktor yang dapat menunjang meningkatnya Angka HLS, beberapa diantaranya adalah akses pendidikan, semakin banyak tersedianya lembaga pendidikan di seluruh jenjang pendidikan maka semakin mudah penduduk untuk mengakses pendidikannya. Kabupaten Pemalang pada tahun mendatang diharapkan memiliki lebih banyak akses untuk pendidikan jenjang perguran tinggi, agar HLS bisa meningkat melebihi angka 12 tahun. Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu

2. **Angka Rata Rata Lama Sekolah**

Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥25 tahun adalah jumlah tahun belajar penduduk umur ≥25 tahun yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator ini untuk melihat kualifikasi dan kualitas penduduk dalam mendapatkan pendidikan. Tingginya angka Rata Rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang dilalui oleh penduduk di sebuah wilayah. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan 12 tahun. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Angka Rata Rata Lama Sekolah di Kabupaten Pemalang dari Tahun 2021 sampai 2024 juga mengalami kenaikan yaitu dari tahun 2021 sebesar 6,45 meningkat sampai tahun 2024 sebesar 6,56. Kenaikan RLS tidak signifikan, dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026. Diperlukan upaya perbaikan dalam sistem pendidikan dengan memberikan akses dan sarana yang memadai bagi penduduk Kabupaten Pemalang untuk menyelesaikan jenjang pendidikan minimal sampai tingkat sekolah menengah atas. Faktor-faktor seperti aksesibilitas, ketersediaan anggaran untuk mendukung keluarga miskin untuk mendapatkan pendidikan dapat berkontribusi pada kenaikan angka RLS. Selain itu, upaya menaikkan RLS akan berimplikasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Adapun program pendidikan kesetaraan juga perlu ditingkatkan untuk memberikan akses dan fasilitas pendidikan bagi anak tidak sekolah (ATS).

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.4 Permasalahan Pelayanan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Permasalahan yag dihadapi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan
   a. Masih belum meratanya jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan
   b. Perlunya penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) secara serius dan mencegah meningkatnya jumlah ATS
   c. Peningkatan implementasi Pendidikan Karakter
   d. Pemenuhan Sarana dan prasarana sekolah Inklusi
   e. Meningkatkan angka melanjutkan ke jenjang lebih tinggi

2. Urusan Kebudayaan
   a. Belum optimalnya pengembangan dan pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Pemalang menjadi wisata Budaya Cagar Budaya yang dilestarikan.
   b. Belum optimalnya perlindungan, pembinaan dan pengembangan kegiatan tradisi budaya serta kegiatan kajian seni di Kabupaten Pemalang masih terbatas.
   c. Masih terbatasnya ruang publik sebagai sarana mengekspresikan seni dan budaya lokal.

Tabel 2.5
Akar Masalah Perangkat Daerah

No	Urusan / Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Data Dukung
1	Pendidikan			
	Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan	Sosial budaya yang berkembang di masyarakat	banyak anak putus sekolah dan anak tidak sekolah	Capaian RLS dan HLS Kabupaten Pemalang Tahun 2025
		Permasalahan ekonomi masyarakat		Angka Partisipasi Sekolah di semua jenjang belum 100%
2	Kepemudaan			
	belum optimalnya peran dan prestasi pemuda	Peran aktif pemuda dalam pembangunan daerah belum optimal.	Belum terstruktur dan terarahnya program pembinaan dan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Urusan / Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Data Dukung
			pemberdayaan pemuda.	
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Prestasi pemuda di bidang kepemudaan, seni, olahraga, dan inovasi masih terbatas.	Terbatasnya fasilitas dan sarana pendukung kegiatan kepemudaan.	
		Keterlibatan pemuda dalam kegiatan positif dan produktif masih rendah.	Kurangnya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, organisasi kepemudaan, dan pihak swasta.	
		Minimnya wadah pembinaan dan pengembangan potensi pemuda.	Rendahnya akses informasi dan kesempatan pemuda terhadap pelatihan, lomba, atau forum pengembangan diri.	
			Kurangnya dukungan anggaran dan kebijakan afirmatif untuk mendorong prestasi pemuda di berbagai bidang.	
3	Olahraga			
	Belum optimalnya pembinaan pembinaan atlet, pelatih dan SDM keolahragaan	Pembinaan atlet belum berjalan secara berjenjang dan berkelanjutan.	Belum adanya sistem pembinaan olahraga yang terintegrasi dari tingkat dasar hingga prestasi.	
		Kompetensi pelatih masih belum merata dan belum sepenuhnya bersertifikasi.	Terbatasnya anggaran untuk pelatihan, pemusatan latihan, dan pengembangan kapasitas SDM olahraga.	
		Pembinaan SDM keolahragaan belum terprogram dengan baik.	Minimnya pelatihan dan sertifikasi bagi pelatih dan tenaga	

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Urusan / Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Data Dukung
			teknis keolahragaan.	
		Prestasi olahraga daerah masih belum menunjukkan peningkatan signifikan.	Kurangnya sinergi antara sekolah, klub olahraga, dan pemerintah daerah dalam pembinaan atlet usia dini.	
		Fasilitas latihan dan sarana prasarana olahraga masih terbatas.	Belum optimalnya pemanfaatan data dan evaluasi kinerja atlet serta pelatih sebagai dasar pengambilan kebijakan.	

2.5 Isu Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

2.5.1 Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementrian / Lembaga

1. RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam Rangka Pencapaian Prioritas Nasional Dinas Pendidikan berkaca pada Prioritas Nasional 4 : ” Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z, dan Penyandang Disabilitas”. Untuk mengawal keberhasilan proses pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, Pendidikan dirumuskan sasaran Nasional sebagai berikut :

Tabel 2.6
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 4 (Pendidikan, Pemuda dan Olahraga)

No.	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata				
1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,22	9,33	9,82
2	Harapan lama sekolah	13,21	13,32	13,58
3	Rata-rata nilai PISA			
3.a	Membaca	359 (2022)	396	409
3.b	Matematika	366 (2022)	404	416
3.c	Sains	383 (2022)	416	426

https://jdih.pemalangkab.go.id

No.	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
4	Rata-rata nilai Asesmen tingkat Nasional			
4.a	Literasi Membaca	60,89 (2023)	62,89	66,89
4.b	Numerasi	51,36 (2023)	54,36	59,86
5	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%)	31,45 (2023)	33,94	38,04
6	Proporsi Penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	10,15 (2023)	11,11	12,68
Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif				
7	Indeks Pembangunan Pemuda	60,59 (2023)	65,16	73,27
Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat				
8	Persentase Penduduk berumur 10 tahun keatas yang aktif berolahraga	9,04	10,36-11,45	12,13-13,40

Sumber: Perpres No 12 Tahun 2025

2. RPJMD Provinsi Jawa Tengah

Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Mengacu pada sasaran 3: Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses layanan Pendidikan berkualitas, melalui:
   a. Peningkatan pemerataan, keterjangkauan, pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan;
   b. Peningkatan kualitas sarpras pendidikan, penguatan pendidikan karakter, digitalisasi pendidikan, kualitas guru serta pengembangan kurikulum adaptif berbasis potensi lokal;
   c. Peningkatan relevansi pendidikan berorientasi pada kesesuaian kompetensi Pendidikan terhadap kebutuhan pasar kerja, penguatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbasis potensi lokal, serta kerjasama multipihak;
   d. Perbaikan tata kelola pendidikan berbasis perencanaan, hasil evaluasi, kepemimpinan instruksional, dan manajemen kelembagaan serta penguatan kerjasama antar pemerintah (pusat-provinsi-kabupaten/kota) dan masyarakat.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2. Meningkatkan daya saing pemuda melalui :
   a. Peningkatan penyadaran pemuda dalam kewirausahaan;
   b. Peningkatan jiiwa kepemimpinan, kepeloporan, serta pemberdayaan pemuda;
3. Meningkatkan kebugaran Masyarakat dan daya saing olahraga melalui:
   a. Peningkatan penyadaran Masyarakat dalam berolahraga;
   b. Peningkatan literasi Masyarakat dalam berolahraga;
   c. Penyediaan sarpras olahraga yang mudah murah dan menarik bagi Masyarakat;
   d. Penguatan sarpras olahraga unggulan;
   e. Pembinaan atlet potensial;

2.5.2 Penentuan Isu Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029, isu strategis yang ke 4 adalah Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing, Berkualitas dan Berkarakter. Pembangunan manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah Kabupaten Pemalang. Dengan kualitas SDM unggul diharapkan mampu mencetak generasi yang berdaya saing, berkualitas dan berkarakter. Kemampuan SDM untuk berdaya saing menjadi tuntutan dalam dunia kerja untuk memenuhi pasar kerja dan dunia usaha. Sementara kemampuan profesional dan kematangan kepribadian saling memperkuat satu sama lain. Profesionalisme dapat turut membentuk karakter sikap dan perilaku serta kepribadian yang tangguh, sementara kepribadian yang tangguh merupakan prasyarat dalam membentuk profesionalisme. Minimal ada 4 (empat) kebijakan pokok dalam upaya penguatan fondasi sumber daya manusia Yang Berdaya Saing, Berkualitas dan Berkarakter yaitu:

1) Peningkatan kualitas hidup manusianya seperti jasmani dan rohani, serta kualitas. kehidupannya seperti perumahan dan pemukiman yang sehat.
2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan upaya pemerataan penyebarannya.

https://jdih.pemalangkab.go.id

3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai IPTEK yang berwawasan lingkungan.
4) Pengembangan pranata yang meliputi kelembagaan dan peran hukum yang mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telahaan visi dan misi serta telaahan terhadap rencana strategis pembangunan pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, maka dapat ditentukan isu dan prioritas strategis yang fokus Pembangunan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga lima tahun yang akan datang adalah Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan.

Penetapan Isu Strategis di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melalui metode diksusi kelompok terfokus *(Focus Group Discussion*). Adapun isu strategis dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang akan diselesaikan pada periode perencanaan tahun 2025 - 2029, adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan
    a. Partisipasi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan
    b. Pelayanan Pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan yang merata
    c. Pendidikan formal jenjang PAUD, SD, SMP dan non formal yang berkualitas dan berdaya saing
    d. Distribusi tenaga pendidik yang berkualitas
    e. Sarana prasarana Pendidikan yang memadai
2. Urusan Pemuda dan Olahraga
    a. Optimalisasi peran pemuda dalam pembangunan daerah
    b. Optimalisasi pembinaan olahraga

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.10
Isu Strategis yang Relevan dengan Isu KLHS

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Urusan Pendidikan	1)Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan 2)belum optimal pelestarian cagar budaya	Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah	Pendidikan	Ketimpangan antar wilayah Jawa dan luar Jawa masih tinggi	Kualitas hidup dan daya saing sumberdaya manusia	
Urusan Pemuda dan Olahraga	belum optimalnya peran dan prestasi pemuda		Bonus Demografi: Tingginya jumlah generasi muda secara global, menuntut pemberdayaan dan partisipasi produktif.	Isu Penganggguran Pemuda: Tingginya angka penganggguran usia muda, khususnya lulusan SMK.	Rendahnya Partisipasi Organisasi Kepemudaan: OKP/karang taruna belum maksimal perannya di Pemalang.	Belum Optimalnya peran pemuda dalam pembangunan daerah
			Transformasi Digital: Tantangan literasi digital, ketimpangan akses, dan isu kesehatan mental akibat digitalisasi.	Kurangnya Pendidikan Karakter dan Kewirausahaan: Tantangan dalam menyiapkan pemuda yang tangguh dan kreatif.	Minimnya Sarana Kreativitas Pemuda: Keterbatasan ruang publik dan wadah pengembangan minat dan bakat.	
			Youth Empowerment dan SDGs: Peran pemuda	Radikalisme dan Perpecahan Sosial di Kalangan Pemuda:	Kurangnya Inkubasi Wirausaha Muda Daerah: Belum	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
			dalam mencapai SDGs (goal 4, 8, dan 16).	Perlu peningkatan wawasan kebangsaan.	optimalnya dukungan terhadap UMKM dan start-up pemuda.	
	Belum optimalnya pembinaan pembinaan atlet, pelatih dan SDM keolahragaan		Sport for Development and Peace (SDP): Olahraga digunakan untuk mempromosikan perdamaian, pendidikan, dan pembangunan sosial	Implementasi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON): Fokus pada pembinaan atlet berprestasi secara sistematis dari usia dini.	Belum optimalnya pembinaan atlet dan pelatih di tingkat daerah: Kurangnya pelatihan, kompetisi rutin, dan regenerasi atlet.	Belum optimalnya pembinaan olahraga
			Kesenjangan akses olahraga: Ketimpangan antara negara maju dan berkembang dalam fasilitas, pelatihan, dan peluang berkompetisi.	Rendahnya prestasi olahraga internasional: Upaya meningkatkan pencapaian dalam ajang seperti Olimpiade dan Asian Games.	Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga yang layak dan merata: Banyak fasilitas belum memenuhi standar pembinaan prestasi.	
			Doping dan integritas olahraga: Ancaman terhadap kejujuran dan kredibilitas olahraga akibat doping dan pengaturan skor.	Keterbatasan SDM dan infrastruktur keolahragaan: Pelatih bersertifikat, fasilitas latihan, dan sistem kompetisi yang masih belum merata.	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam olahraga rekreasi dan gaya hidup sehat: Kurang kegiatan olahraga massal atau komunitas.	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB III
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

3.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dengan Indikator:
   a. Indeks Pendidikan
   b. Indeks Pembangunan Pemuda
   c. Indeks Pembangunan Olahraga

3.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Adapun sasaran dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan, dengan Indikator:
   a. Rata-rata Lama Sekolah
   b. Harapan Lama Sekolah
2. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah, dengan Indikator:
   a. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
3. Meningkatnya prestasi olahraga, dengan Indikator:

https://jdih.pemalangkab.go.id

a. Peningkatan prestasi olahraga (olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan olahraga paralimpic).

Tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan kualitas pendidikan, pemuda dan olahraga		Indeks Pendidikan	Indeks	59,88	74,16	78,76	83,76	88,76	93,76	98,76	100,00	100,00
			Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	n/a	0,232	n/a	0,235	0,240	0,245	0,250	0,255	0,255
			Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	59,07	n/a	n/a	60,07	60,57	61,07	61,57	62,07	62,07
2		Meningkatnya kualitas pelayanan Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,55	6,56	7,90	8,01	8,12	8,23	8,34	8,45	8,45
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,01	12,02	12,80	12,95	13,10	13,25	13,40	13,44	13,44
3		Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	13,42	17,38	17,65	17,92	18,20	18,47	18,74	19,02	19,02

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4		Meningkatnya prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga (olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan olahraga paralimpic.)	Medali	48,00	59,00	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	65,00	65,00
5		Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah	IKM	Nilai	84,58	85,11	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00	91,00
			Nilai SAKIP OPD	Nilai	64,15	65,05	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00	71,00	71,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang dapat dijabarkan sebagai berikut:

3.3.1 Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan
b. Meningkatkan peran dan partisipasi pemuda dengan peningkatan kesadaran dan kepedulian pemuda, pengembangan program dan kegiatan, peningkatan akses dan fasilitas dan pemberdayaan organisasi kepemudaan.
c. Meningkatkan keikutsertaan atlet dalam kejuaraan regional dengan identifikasi dan pembinaan atlet berbakat, peningkatan fasilitas dan sarana latihan, peningkatan kapasitas pelatih, penyediaan insentif untuk atlet, meningkatkan frekuensi dan kualitas kompetisi lokal.

3.3.2 Arah Kebijakan

Kebijakan sebagai langkah strategis dalam menentukan arah program yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam beraktivitas. Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

a. Penanganan Anak Tidak Sekolah
b. Verifikasi dan Validasi data Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Pemalang
c. Meningkatkan efektifitas kegiatan Njuh Sekolah Maning
d. Peningkatan kualitas Pendidikan dari Sarpras, kurikulum, hingga Tenaga Kependidikan
e. Peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga difokuskan pada pengembangan SDM dan peningkatan fasilitas.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pencapaian Sasaran pada Renstra juga merujuk pada Pentahapan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selama kurun waktu tahun 2025-2029 yang ditampilkan sebagai berikut :

Pentahapan Renstra Dindikbud 2025-2029

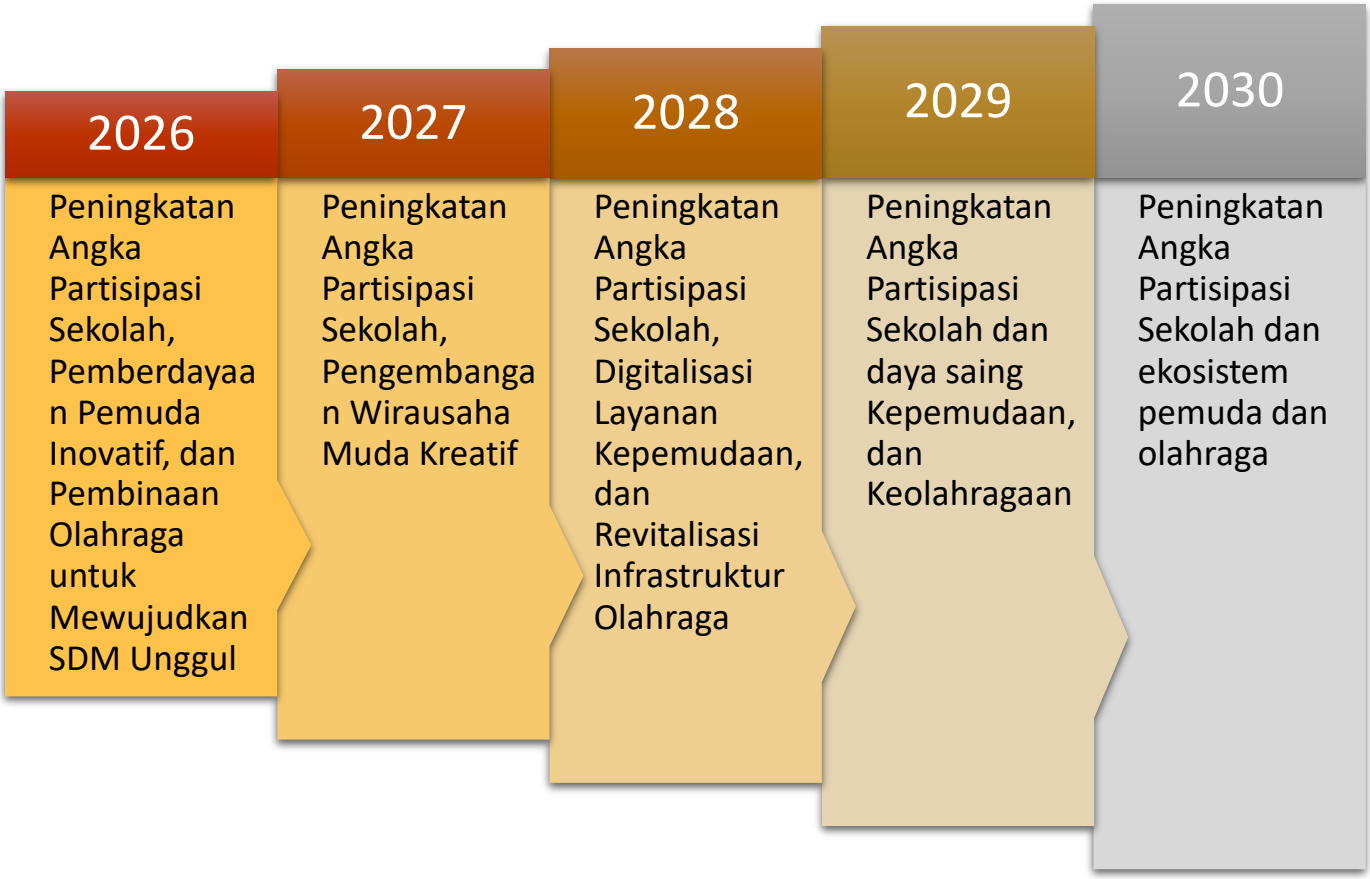

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan tujuan, sasaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada Tabel 3.2

https://jdih.pemalangkab.go.id
Pemerintah Kabupaten Pemalang

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kualitas pendidikan, pemuda dan olahraga		Indeks Pendidikan	Peningkatan partisipasi sekolah di masyarakat	Pembangunan Infrastruktur Pendidikan
			Indeks Pembangunan Olahraga		
			Indeks Pembangunan Pemuda		
		Meningkatnya kualitas pelayanan Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Peningkatan mutu pendidikan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan
			Harapan Lama Sekolah		Pengembangan kurikulum pendidikan nasional maupun kurikulum muatan lokal

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6
		Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Meningkatkan peran dan partisipasi pemuda dengan peningkatan kesadaran dan kepedulian pemuda, pengembangan program dan kegiatan, peningkatan akses dan fasilitas dan pemberdayaan organisasi kepemudaan.	Peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga difokuskan pada pengembangan SDM dan peningkatan fasilitas.
		Meningkatnya prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga (olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan olahraga paralimpic.)	Meningkatkan keikutsertaan atlet dalam kejuaraan regional dengan identifikasi dan pembinaan atlet berbakat, peningkatan fasilitas dan sarana latihan, peningkatan kapasitas pelatih, penyediaan insentif untuk atlet, meningkatkan frekuensi dan kualitas kompetisi lokal.	
		Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah	IKM		
			Nilai SAKIP OPD		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB IV
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Rencana program untuk tahun 2025 – 2029 kedepan penyusunan program pembangunan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang, akan terus berlanjut dan diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang serta sesuai dengan misi ke-3 yaitu: **"Meningkatkan daya saing pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan"**.

Selain kegiatan administrasi perkantoran yang sifatnya rutin, untuk mengatasi permasalahan yang akan dihadapi tahun 2025 - 2029 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang mencanangkan Program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan perwujudan dari kebijakan operasional sebagai kelanjutan kebijakan **"Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel"**.

Rencana program dan kegiatan, serta pendanaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Kabupaten Pemalang dapat dilihat dari tabel berikut ;

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.1

Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan kualitas pendidikan, pemuda dan olahraga	Meningkatnya kualitas pelayanan Pendidikan	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	Persentase	285.749.259	100	265.017.044	0	264.158.894	0	68.326.801	0	68.326.801	0	68.326.801	0	68.326.801	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
		Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah SD	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	Persentase	167.743.210	100	150.656.254	0	150.464.805	0	25.360.001	0	25.360.001	0	25.360.001	0	25.360.001	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	8.383.970	10	1.988.500	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	1.654.224	1	108.862	1	109.362	1	110.000	1	110.000	1	110.000	1	110.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	1.382.668	785	222.200	785	250.000	785	250.000	785	250.000	785	250.000	785	250.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan	Orang	18.782.152	13544	17.947.167	13544	18.660.000	13544	15.000.000	13544	15.000.000	13544	15.000.000	13544	15.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Pendidikan Sekolah Dasar	Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi																
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	117.230.574	739	117.303.000	739	117.303.000	739	1	739	1	739	1	739	1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	817.071	738	365.200	739	380.000	739	400.000	739	400.000	739	400.000	739	400.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi,	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			(TIK) untuk Pendidikan	Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Teks Peserta Didik																	
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	199.442	3	1.007.495	3	1.014.995	3	1.100.000	3	1.100.000	3	1.100.000	3	1.100.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	5.195.032	16	3.555.023	10	2.505.000	10	2.500.000	10	2.500.000	10	2.500.000	10	2.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	318.950	738	139.250	739	150.000	739	150.000	739	150.000	739	150.000	739	150.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	10.809.040	20	7.279.000	20	7.250.000	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	982.148	5000	498.233	5000	500.000	5000	500.000	5000	500.000	5000	500.000	5000	500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	1.987.940	2	242.325	10	342.449	10	350.000	10	350.000	10	350.000	10	350.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
		Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah SMP	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-		74.616.405	100	72.110.636	0	70.792.830	0	11.525.000	0	11.525.000	0	11.525.000	0	11.525.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	3.938.983	13	3.147.500	19	3.197.500	19	3.000.000	19	3.000.000	19	3.000.000	19	3.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	6.790.412	47	6.317.710	40	6.017.710	40	4.000.000	40	4.000.000	40	4.000.000	40	4.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	2.669.178	11	357.875	41	357.875	41	350.000	41	350.000	41	350.000	41	350.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	1.943.068	2900	3.894.055	2900	2.420.000	2900	2.500.000	2900	2.500.000	2900	2.500.000	2900	2.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	719.541	1795	429.545	1795	500.000	1795	500.000	1795	500.000	1795	500.000	1795	500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembinaan Kelembagaan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang	Satuan Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan,	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			dan Manajemen Sekolah	Dilaksanakan Pembinaan															Pemuda dan Olahraga	
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	56.832.721	118	57.126.600	121	57.126.600	121	0	121	0	121	0	121	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	266.858	118	72.706	121	100.000	121	100.000	121	100.000	121	100.000	121	100.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan	684.625	2300	391.500	121	450.000	121	450.000	121	450.000	121	450.000	121	450.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Rehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Asrama Sekolah yang	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan,	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Asrama Sekolah	telah direhabilitasi sedang/berat															Pemuda dan Olahraga	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	771.019	5	373.145	5	623.145	5	625.000	5	625.000	5	625.000	5	625.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-		30.907.485	100	27.445.301	0	27.786.060	0	26.941.800	0	26.941.800	0	26.941.800	0	26.941.800	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	2.055.758	12	1.932.995	10	2.119.450	10	2.000.000	10	2.000.000	10	2.000.000	10	2.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket	588.604	10	102.585	80	373.600	80	350.000	80	350.000	80	350.000	80	350.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Paket	1.166.976	30	469.179	150	870.154	150	900.000	150	900.000	150	900.000	150	900.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Penyediaan Biaya Personil	Jumlah Peserta Didik PAUD yang	Peserta Didik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan,	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Peserta Didik PAUD	Menerima Biaya Personil Peserta Didik															Pemuda dan Olahraga	
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	2.655.161	806	1.880.713	806	2.200.000	806	1.500.000	806	1.500.000	806	1.500.000	806	1.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	19.848.702	792	20.191.800	792	20.191.800	792	20.191.800	792	20.191.800	792	20.191.800	792	20.191.800	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi,	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			(TIK) untuk Pendidikan	Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembinaan Minat, Bakat	Jumlah Peserta Didik yang	Peserta Didik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan,	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			dan Kreativitas Peserta Didik	Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik															Pemuda dan Olahraga	
			Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	4.592.285	26	2.868.029	80	2.031.056	80	2.000.000	80	2.000.000	80	2.000.000	80	2.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-		12.482.159	100	14.804.854	0	15.115.200	0	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Nonformal/Kesetaraan																		
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	3.000.000	1	4.500.000	1	4.500.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	6.526.040	16	7.990.200	16	7.990.200	16	0	16	0	16	0	16	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Dilaksanakan Pemeliharaan																
			Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	kekerasan, dan intoleransi																
			Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Bimbingan Teknis,	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis,	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan,	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan															Pemuda dan Olahraga	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Peserta Didik	2.956.119	2800	2.314.654	2800	2.625.000	2800	1.500.000	2800	1.500.000	2800	1.500.000	2800	1.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Berkebutuhan Khusus	Khusus yang Telah Direhabilitasi																
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Taman Bacaan Masyarakat	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		Meningkatnya Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	Persentase	1.219.426	100	132.075	100	150.000	100	150.000	100	150.000	100	150.000	100	150.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	Persentase	1.219.426	100	132.075	100	150.000	100	150.000	100	150.000	100	150.000	100	150.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Buku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Orang	1.219.426	400	132.075	400	150.000	400	150.000	400	150.000	400	150.000	400	150.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Pelaksanaan penilaian/penelahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	Buku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini	Buku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia																
			Pelaksanaan penilaian/penelahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai	Buku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		Meningkatnya Indeks Pemerataan Guru (Redistribusi guru)	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	Persentase	790.440	100	430.063	100	690.000	100	400.000	100	400.000	100	400.000	100	400.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
		Meningkatnya Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	Persentase	790.440	100	430.063	100	690.000	100	400.000	100	400.000	100	400.000	100	400.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dokumen	394.130	4	237.179	4	390.000	4	200.000	4	200.000	4	200.000	4	200.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	396.310	4	192.884	4	300.000	4	200.000	4	200.000	4	200.000	4	200.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Penilaian Kelayakan Usul	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan,	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat															Pemuda dan Olahraga	
			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	Bahasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Penyusunan Modul dan Bahan Ajar	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan,	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun															Pemuda dan Olahraga	
			Penyusunan Kamus Bahasa Daerah	Jumlah Kamus Bahasa Daerah kewenangan kabupaten/kota	Buku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	Persentase Organisasi pemuda yang aktif	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi pemuda yang aktif	%	0			58,82	650.000	64,71	650.000	70,59	650.000	76,47	650.000	82,35	650.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemberdayaan pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan kader pemuda yang dilaksanakan	Kegiatan	0			3	450.000	3	450.000	3	450.000	3	450.000	3	450.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	Dokumen	0			1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang	0			7	50.000	10	50.000	10	50.000	10	50.000	10	50.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	Orang	0			10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kegiatan	0			1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	Orang	0			10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Orang	0			18	100.000	9	110.000	10	110.000	10	110.000	10	110.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Unit	0			1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemuda yang terdaftar	organisasi	0			10	200.000	11	200.000	12	200.000	13	200.000	14	200.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi	0			1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Orang	0			10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
	Meningkatnya prestasi olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	0			57,89	3.703.777	60,53	3.703.777	63,16	3.703.777	65,79	3.703.777	68,42	3.703.777	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlet pelajar yang dibina	Atlet	0			299	200.000	300	200.000	301	200.000	302	200.000	303	200.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan	Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota	Unit	0			1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota																	
			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Unit	0			1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Dokumen	0			1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan yang diselenggarakan dan diikuti	Kegiatan	0			3	450.000	3	450.000	3	450.000	3	450.000	3	450.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kegiatan	0			3	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	Kegiatan	0			1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			kabupaten/kota dan kabupaten/kota																	
			Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Orang	0			210	200.000	220	200.000	230	200.000	240	200.000	250	200.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pemusatan pelatihan	kegiatan	0			1	453.777	1	453.777	1	453.777	1	453.777	1	453.777	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	0			10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Orang	0			35	100.000	35	750.000	35	750.000		750.000		750.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Pelatda	0			1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang	0			1	0	16	350.000	7	350.000	8	350.000	9	350.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Dokumen	0			1	153.777	1	153.777	1	153.777	1	153.777	1	153.777	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi olahrga yang memiliki kerjasama	Organisasi	0			3	2.500.000	3	2.500.000	3	2.500.000	3	2.500.000	3	2.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	Dokumen	0			1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Dokumen	0			2	2.500.000	2	1.066.677	3	1.066.677	3	1.066.677	3	1.066.677	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah pemasalasan olahraga rekreasi	Kegiatan	0			1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Laporan	0			1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Laporan	0			1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Dokumen	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	0			1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pemassalan olahraga dan	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi	Lembaga	0	0	0	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	Dinas Pendidikan,	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi															Pemuda dan Olahraga	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlet pelajar yang dibina	Atlet	0	0	0	299	0	300	0	301	0	302	0	303	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan PelaksanaanPemberdayaan Perkumpulan Olahraga danPenyelenggaraan Kompetisi oleh SatuanPendidikan Menengah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah	Dokumen	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlet pelajar yang dibina	Atlet	0	0	0	299	0	300	0	301	0	302	0	303	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan PelaksanaanPemberdayaan Perkumpulan Olahraga danPenyelenggaraan Kompetisi oleh SatuanPendidikan Menengah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah	Dokumen	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatnya kapasitas kepramukaan	Persentase pramuka tingkat Kabupaten yang dibina	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pramuka tingkat Kabupaten yang dibina	%	0	0	0	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan di kab pemalang yang dibina	Organisasi	0	0	0	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi	0	0	0	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	0	0	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	Unit	0			1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Laporan	0			1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	0			1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kepramukaan Tingkat Daerah																	
			Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Organisasi	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase	818.898.940	100	874.813.906	100	875.174.006	100	1.899.193.736	100	1.942.662.807	100	1.988.542.244	100	2.036.620.854	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Persentase	406.314	100	29.661	100	44.456	100	47.500	100	0	100	50.500	100	34.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	364.365	4	6.548	2	6.548	2	7.000	2	0	2	7.500	2	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0	0	0	1	7.203	1	8.000	1	0	1	8.500	1	8.500	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	0	0	0	1	7.203	1	8.000	1	0	1	8.500	1	8.500	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Dokumen	15.949	1	7.203	1	7.592	1	8.000	1	0	1	8.500	1	8.500	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Dokumen DPA-SKPD																
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	15.999	1	7.592	1	7.592	1	8.000	1	0	1	8.500	1	8.500	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10.000	1	8.317	3	8.317	3	8.500	3	0	3	9.000	3	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	Persentase	815.538.333	100	872.500.370	0	872.482.558	0	872.483.424	0	916.083.245	0	961.911.182	0	1.010.005.291	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	815.430.131	7800	872.464.236	5000	872.446.424	5000	872.446.424	5000	916.068.745	5000	961.872.182	5000	1.009.965.791	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	78.202	65	22.600	65	22.600	65	23.000	65	0	65	24.000	65	24.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	15.000	1	5.062	1	5.062	1	5.500	1	5.500	1	5.500	1	5.500	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Laporan	15.000	1	8.473	1	8.473	1	8.500	1	9.000	1	9.500	1	10.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD																
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	Persentase	201.327	100	194.182	0	236.063	0	236.063	0	236.063	0	236.063	0	236.063	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	201.327	1	194.182	1	236.063	1	236.063	1	236.063	1	236.063	1	236.063	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	Persentase	1.294.574	100	1.076.325	0	1.397.560	0	1.025.387.250	0	1.025.301.000	0	1.025.302.000	0	1.025.303.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	34.210	1	25.062	1	25.062	1	25.000	1	26.000	1	27.000	1	28.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	69.800	1	17.500	1	17.500	1	20.000	1	0	1	0	1	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	34.620	1	39.937	1	39.937	1	40.000	1	0	1	0	1	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	196.962	1	183.253	1	220.457	1	230.000	1	230.000	1	230.000	1	230.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	59.770	1	30.068	1	40.090	1	40.000	1	45.000	1	45.000	1	45.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	36.050	1	32.250	1	32.250	1	32.250	1	0	1	0	1	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	863.162	60	748.255	60	1.022.264	60	1.025.000.000	60	1.025.000.000	60	1.025.000.000	60	1.025.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Persentase	315.700	100	281.076	0	281.076	0	282.000	0	285.000	0	285.000	0	285.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	315.700	20	281.076	20	281.076	20	282.000	20	285.000	20	285.000	20	285.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Persentase	284.540	100	368.204	0	368.204	0	392.500	0	392.500	0	392.500	0	392.500	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5.400	1	2.500	1	2.500	1	2.500	1	2.500	1	2.500	1	2.500	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	274.140	12	278.704	1	278.704	1	300.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5.000	1	87.000	1	87.000	1	90.000	1	90.000	1	90.000	1	90.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Persentase	858.152	100	364.090	0	364.090	0	365.000	0	365.000	0	365.000	0	365.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	154.622	56	143.450	56	143.450	56	145.000	56	145.000	56	145.000	56	145.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	50.000	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	20.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	86.562	85	54.740	6	54.740	6	50.000	6	50.000	6	50.000	6	50.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	566.968	6	145.900	6	145.900	6	150.000	6	150.000	6	150.000	6	150.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kab. Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id
Pemerintah Kabupaten Pemalang

Tabel 4.2

Dukungan Program Prioritas Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
1	Pemberian Seragam Sekolah Gratis	Bantuan Seragam Sekolah	Penyediaan Biaya Personil SD	
			Penyediaan Biaya Personil SMP	
			Pembinaan Kelembagaan PAUD	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
2	Pemberian LKS Gratis	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
3	Insentif Bagi Honorer Guru	Kesejahteraan Tenaga Kependidikan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	

Program prioritas yang didukung Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya dengan menggunakan Anggaran pada Dindikbud. Pada jenjang SD dialokasikan Sebesar Rp.478.500.000,- untuk 1450 anak dan setiap anak mendapat 1 stel seragam merah putih dan 1 stel seragam pramuka. Pada Jenjang SMP Negeri dialokasikan Rp. 2.209.800.000,- untuk 5.080 anak yg masing-masing mendapat 1 stel osis dan 1 stel pramuka. Pada jenjang SMP Swasta dialokasikan Rp. 485.460.000,- untuk 1.116 anak yg masing-masing mendapat 1 stel osis dan 1 stel pramuka. Untuk siswa SMP swasta diberikan bantuan BOSDA dg alokasi Rp. 990.000.000,- untuk 1980 anak masing-masing Rp.

https://jdih.pemalangkab.go.id
Pemerintah Kabupaten Pemalang

500.000,00. Untuk jenjang PAUD seragam diberikan kepada 1872 Siswa dengan alokasi Rp. 748.800.000,- yang masing-masing anak mendapatkan 3 stel pakaian sekolah. Untuk jenjang kesetaraan pemberian Bosda kepada 2400 orang masing-masing Rp. 500.000,-

2. Akan dilaksanakan melalui BOS regular. KKG dan MGMP untuk menyamakan persepsi dan diharapkan akan tersusun LKS yang sesuai kebutuhan guru dan siswa. Guru membuat LKS dan kemudian digandakan melalui anggaran BOS Reguler.
3. Honor bagi tenaga honorer telah di alokasikan sebesar Rp. 14.688.600.000,-

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 4.3, dan Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendidikan pada Tabel 4.4

https://jdih.pemalangkab.go.id
Pemerintah Kabupaten Pemalang

Tabel 4.3

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Pendidikan	Indeks	0,60	0,74	0,79	0,84	0,89	0,94	0,99	1,00	1,00
2	IKM	Indeks	84,58	85,11	86	87	88	89	90	91	91
3	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	0,255	0,255	0,255	0,255	0,255	0,255	0,255	0,255	0,255
4	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07	62,07

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,55	6,56	7,9	8,01	8,12	8,23	8,34	8,45	8,45
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,01	12,02	12,8	12,95	13,1	13,25	13,4	13,44	13,44
3	SAKIP	Nilai	64,15	65,05	66	67	68	69	70	71	71
4	Angka Partisipasi Sekolah PAUD	%	84,39	71,45	87,5	90,46	93,01	95,56	98,11	100	100
5	Angka Partisipasi Sekolah dasar	%	99,07	94,32	99,18	99,32	99,45	99,59	99,73	99,86	99,86
6	Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama	%	93,04	82,37	90,44	92,04	93,63	95,22	96,81	98,41	98,41

https://jdih.pemalangkab.go.id
Pemerintah Kabupaten Pemalang

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Angka Partisipasi Sekolah Kesetaraan	%	12,01	16,54	20,61	24,71	28,81	32,91	37,01	41,11	41,11
15	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,01	0,03	0,035	0,04	0,045	0,05	0,055	0,06	0,06
16	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	48,75	52,61	38,66	38,69	38,72	38,75	38,77	38,8	38,8
17	Peningkatan Prestasi Olahraga	%	52	59	60	61	62	63	64	65	65

https://jdih.pemalangkab.go.id
Pemerintah Kabupaten Pemalang

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang sebagaimana dikemukakan dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berperan aktif dalam mendukung dan mensukseskan tercapainya Visi Kabupaten Pemalang yaitu: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan dalam Terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Pemalang yaitu "**PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA"** dan Misi **RHAPSODI (Resik, Hijau, Apik, Peduli, Silaturahmi, Organisatoris, Digitalisasi dan Ikhlas)** dan agenda pembangunan daerah sesuai kewenangan dalam pembangunan bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang bersifat strategis bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan jatidiri masyarakat Pemalang dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah serta memperkuat nilai nilai religius dan budaya.

Agar Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dapat terlaksana dengan baik maka diperlukan kesatuan langkah dan kesamaan pandang dari segenap aparatur dinas dan pemangku kepentingan pembangunan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dilaksanakan setiap tahun melalui rencana kerja perangkat daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang.

5.1 Pedoman Transisi

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dalam bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) setelah Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berakhir. Oleh karena itu, Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 -2029 ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan berpedoman arah kebijakan dalam RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2045 yang baru.

https://jdih.pemalangkab.go.id
Pemerintah Kabupaten Pemalang

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 dimaksudkan menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, agar dicapai efektivitas dan efisiensi, baik dalam pendanaan program maupun waktu pelaksanaan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kaidah pelaksanaan dikemukakan sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang bidang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga wajib mendukung tercapainya target-target yang ditetapkan dalam Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Seluruh aparatur di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga wajib menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga setiap tahun dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan selama periode perencanaan selama lima tahun.
4. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan arah kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja PD ini wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala.
6. Laporan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepada Bupati Pemalang melalui Bappeda Kabupaten Pemalang secara berkala dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pemalang,…….

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG,

ISMUN HADIYO, S.Pd.SD

NIP. 19710817 199303 1 008

https://dikbud.pemalangkab.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029 berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan tersebut mengatur perubahan nomenklatur perangkat daerah, dari semula Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud).

Perubahan kelembagaan ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan daerah sekaligus tindak lanjut kebijakan nasional dalam penataan urusan pemerintahan daerah. Peralihan tersebut ditandai dengan pengalihan urusan yang semula mengampu bidang kepemudaan dan olahraga, bergeser menjadi bidang kebudayaan. Dengan demikian, fokus tugas dan fungsi perangkat daerah kini terarah pada pembangunan sektor pariwisata dan kebudayaan.

Sejalan dengan perubahan tersebut, Renstra Disparbud Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029 disusun untuk memberikan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan pariwisata dan kebudayaan dalam kurun lima tahun mendatang. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh jajaran perangkat daerah dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi program dan kegiatan yang mendukung pengembangan pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Pemalang, sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian visi pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Rencana Strategis (Renstra) periode 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan fundamental yang mengarahkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks dan kompetitif. Dokumen ini menjadi kompas yang memberikan arah, fokus, dan strategi sistematis di tengah

https://jdih.pemalangkab.go.id

tantangan dan peluang yang terus berkembang. Melalui Renstra ini, dilakukan pemetaan komprehensif terhadap potensi internal, analisis lingkungan eksternal, dan proyeksi masa depan, sehingga dapat merumuskan sasaran strategis, program prioritas, dan indikator kinerja yang terukur dan bermakna. Proses penyusunan Renstra 2025-2029 dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang responsif, adaptif, dan berkelanjutan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029 merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman strategis bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun dengan mendasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, yang menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil. Dengan memperhatikan visi dan misi Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029, serta dinamika dan tantangan pembangunan daerah, dokumen ini diharapkan menjadi landasan perencanaan yang terarah, efektif, dan akuntabel dalam pembangunan sektor pariwisata, dan nilai-nilai kebudayaan di Kabupaten Pemalang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan undang undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah baik yang bersifat jangka panjang, menengah maupun pendek. Undang-undang ini mengamanatkan setiap daerah harus menyusun perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari RPJP, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja OPD dan RKPD.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tahapan penyusunan rancangan renstra dapat digambarkan dalam bagian alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Konsep Rencana Strategis Disparbud
Kabupaten Pemalang

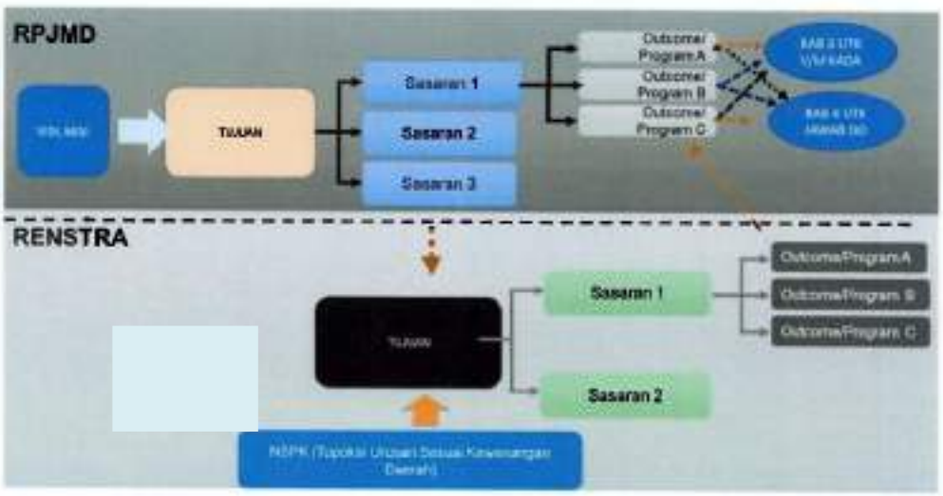

Gambar 1.2.
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Disparbud Kabupaten Pemalang

Renstra memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis, renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima

https://jdih.pemalangkab.go.id

tahun. Selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 yang mengacu pada agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029. Selain sebagai bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan diatas, juga didasarkan kepada kebutuhan pembangunan Dinas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk mendukung pencapaian Visi, Misi,Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Pemalang.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum yang melandasi penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2025– 2029 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

https://jdih.pemalangkab.go.id

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Nomor 11 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4966);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6055);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

https://jdih.pemalangkab.go.id

10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5726);
14. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi UNESCO 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 163);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 21);

https://jdih.pemalangkab.go.id

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1254);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 66);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);

https://jdih.pemalangkab.go.id

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pengelola Obyek Wisata pada Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pemalang;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima yang mencakup gambaran kinerja, permasalah, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang sebagai penjabaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang, adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang dalam menyusun

https://jdih.pemalangkab.go.id

Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I **Pendahuluan**

Pendahuluan berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

1.1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Disparbud Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Disparbud Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Disparbud Kabupaten Pemalang.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasikan dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Disparbud Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 serta disusun sesuai kaidah penyusunan produk hukum.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan Renstra Disparbud Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

1.4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Disparbud Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Bab II **Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id

Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggungjawab Disparbud Kabupaten Pemalang dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Menyajikan tugas, fungsi dan struktur Disparbud Kabupaten Pemalang

2.1.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

Menyajikan data-data dan informasi sumberdaya Disparbud Kabupaten Pemalang yang meliputi sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menyajikan data-data dan informasi pelayanan yang menjadi urusan dan tanggung jawab Disparbud Kabupaten Pemalang

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Mengidentifikasikan masyarakat yang terlibat dalam urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Mengidentifikasikan Perangkat Daerah yang terilbat dalam rangka meningkatkan kontribusi pariwisata dan nilai-nilai kebudayaan dalam Pembangunan daerah

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Mengidentifikasikan permasalahan dan isu strategis yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Disparbud Kabupaten

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pemalang dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Disparbud Kabupaten Pemalang.

2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah

Mengidentifikasikan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Disparbud Kabupaten Pemalang

2.2.2. Isu Strategis

Mengidentifikasikan isu strategis sesuai lingkungan dinamis yang dapat mempengaruhi Disparbud Kabupaten Pemalang baik secara langsung maupun tidak langsung

BAB III **Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

Menyajikan tujuan, sasaran dan arah kebijakan Renstra Disparbud Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Menentukan tujuan Renstra Disparbud Kabupaten Pemalang berdasarkan NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Menentukan Renstra Disparbud Kabupaten Pemalang berdasarkan NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat

3.3. Strategi Perangkat Daerah

Menentukan strategi Renstra Disparbud Kabupaten Pemalang berisi tindakan yang komprehensif yang akan dilakukan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Disparbud Kabupaten Pemalang

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Menyajikan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Disparbud Kabupaten Pemalang

BAB IV **Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

https://jdih.pemalangkab.go.id

Menyajikan program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan pariwisata dan kebudayaan

4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Menyajikan program, kegiatan dan subkegiatan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output.

4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Menyajikan indikator kinerja utama atau IKU Disparbud Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta menjadikan IKU tersebut sebagai prioritas utama

4.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Menyajikan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Disparbud Kabupaten Pemalang

BAB V **Penutup**

Menyajikan kesimpulan penting subtansial, kaidah pelaksanaan serta pelaksanaan pengendalian evaluasi

5.1. Kesimpulan Penting Subtansial

Menyajikan kesimpulan penting substansial Rencana Strategis Disparbud Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Menyajikan kaidah pelaksanaan Renstra Disparbud Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

5.3. Pelaksanaan Pengendalian Evaluasi

Menyajikan Pelaksanaan pengendalian evaluasi Renstra Disparbud Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 bertujuan untuk memastikan pencapaian target program dan kegiatan, menilai kinerja serta

https://jdih.pemalangkab.go.id

mengendalikan risiko strategis Disparbud Kabupaten Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi.

2.1.1 Struktur Organisasi

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No 4 tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang terdiri dari :

1. Kepala Dinas,
2. Sekretariat, terdiri dari:
   a. Subbagian Bina Program dan Keuangan, dan
   b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
4. Bidang Kebudayaan
5. UPTD, dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang sebagaimana dibawah.

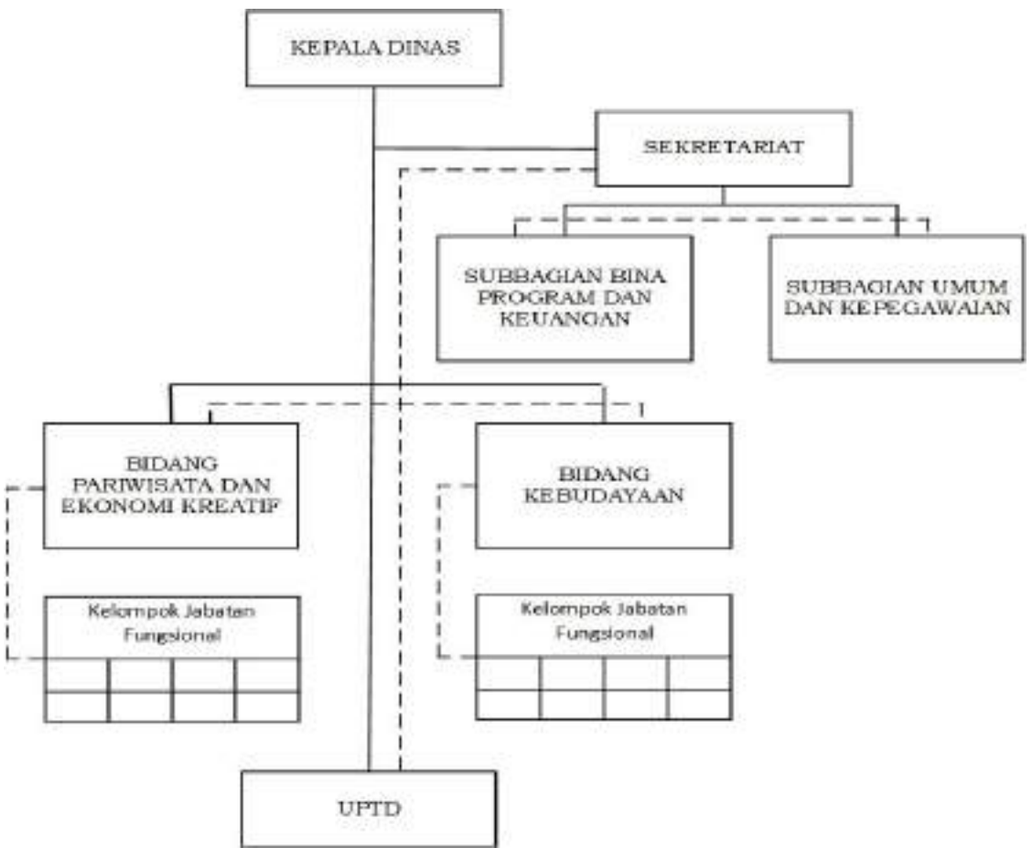

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.1.2 Uraian Tugas

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Disparbud merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan. Disparbud dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pelaksanaan Tugas Pokok Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang dilaksanakan oleh masing-masing Bidang dan Sekretariat. Secara terperinci tugas dan fungsi tersebut dikelompokkan menjadi :

1. Kepala Dinas

   Kepala Disparbud mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

   Kepala Disparbud menyelenggarakan fungsi:

   a. perumusan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta bidang kebudayaan;
   b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta bidang kebudayaan;
   c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta bidang kebudayaan;
   d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
   e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

   Kepala Disparbud mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

   a. menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta bidang kebudayaan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
   b. merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta bidang kebudayaan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

c. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintah bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta bidang kebudayaan sesuai dengan program dan kegiatan.
d. merumuskan kebijakan teknis kerjasama urusan pemerintah bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta bidang kebudayaan sesuai dengan program dan kegiatan
e. mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta bidang kebudayaan.
f. mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta bidang kebudayaan.
g. mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta bidang kebudayaan sesuai dengan unsur SPIP.
h. mengarahkan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta bidang kebudayaan.
i. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta bidang kebudayaan.
j. merumuskan inovasi daerah urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta bidang kebudayaan.
k. merumuskan laporan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta bidang kebudayaan.
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan mengoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Disparbud, Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

a. mengoordinasikan kegiatan di lingkungan Disparbud;

https://jdih.pemalangkab.go.id

b. mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Disparbud;
c. mengoordinasikan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Disparbud;
d. mengoordinasikan, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Disparbud;
e. mengoordinasikan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
f. mengoordinasikan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Disparbud;
g. mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Disparbud; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan Disparbud.
b. mengoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan.
c. menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan Disparbud.
d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengelolaan dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kedinasan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, draft kerjasama, keuangan, kerumahtanggan, barang milik daerah, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dokumentasi dan pengadaan barang/ jasa.
e. menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian.
f. mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik.

https://jdih.pemalangkab.go.id

g. menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang pariwisata serta bidang Budaya sesuai dengan unsur SPIP.
h. Melaksanakan pengelolaan resiko operasional atas pelaksanaan kegiatan di sekretariat
i. menyusun konsep inovasi kesekretariatan.
j. mengoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang-bidang.
k. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan.
l. mengoordinasikan penyusunan laporan urusan pemerintahan bidang pariwisata serta bidang Budaya.
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. merencanakan program dan kegiatan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
b. menyusun rancangan kebijakan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
c. merumuskan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
d. menyelenggarakan program peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata yang meliputi perencanaan pengelolaan daya Tarik wisata Kabupaten; peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif, pengelolaan Kawasan

https://jdih.pemalangkab.go.id

strategis pariwisata Kabupaten; pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten; penetapan tanda daftar usaha pariwisata Daerah Kabupaten; penetapan rencana induk pariwisata di Kabupaten; dan program rencana kerjasama peningkatan daya tarik wisata

e. menyelenggarakan pelaksanaan program pemasaran pariwisata di dalam dan di luar negeri yang meliputi penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Kabupaten; peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata; monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata; fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata Kabupaten; penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya; koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pemberian kemudahan kunjungan wisatawan; serta fasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah dan pemberian penghargaan pada mitra berprestasi;
f. menyelenggarakan pelaksanaan program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual yang meliputi penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah serta pengembangan ekosistem ekonomi kreatif.
g. menyelenggarakan pelaksanaan program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang meliputi pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar; pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif serta pengembangan kapasitas SDM bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dan pemberian penghargaan pada mitra berprestasi.
h. Menyusun konsep kerjasama pengembangan urusan pariwisata dan ekonomi kreatif
i. melaksanakan pengelolaan resiko operasional atas kegiatan yang dilaksanakan bidang anggaran
j. menyusun konsep inovasi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

https://jdih.pemalangkab.go.id

k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
l. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
m. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepala Bidang Kebudayaan

Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan, Kepala Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan; dan
b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. merencanakan program dan kegiatan Bidang Kebudayaan sesuai dengan dokumen perencanaan.
b. menyusun rancangan kebijakan Bidang Kebudayaan.
c. merumuskan kebijakan teknis di Bidang Kebudayaan.
d. menyelenggarakan pelaksanaan program pengembangan kebudayaan meliputi kegiatan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten; kegiatan pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten; serta kegiatan pembinaan lembaga adat dalam Daerah Kabupaten.
e. menyelenggarakan pelaksanaan program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dan permuseuman meliputi kegiatan penetapan cagar budaya; pengelolaan cagar budaya; penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah; penetapan sistem zonasi situs dan/atau kawasan cagar budaya serta pelestarian cagar budaya dan kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten.

https://jdih.pemalangkab.go.id

f. menyelenggarakan pelaksanaan program pembinaan sejarah yang meliputi kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia dan Lembaga sejarah lokal Kabupaten; penyediaan sarana dan prasarana pembinaan sejarah; serta peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah dan pemberian penghargaan pada mitra berprestasi.

g. menyelenggarakan pelaksanaan program pengembangan kesenian tradisional yang meliputi peningkatan Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional dan pemberian penghargaan pada mitra berprestasi; standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesenian tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; serta peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional.

h. menyelenggarakan pelaksanaan program pengelolaan permuseuman yang meliputi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi secara terpadu; pembinaan dan peningkatan mutu dan kapasitas sumber daya manusia permuseuman; peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum; penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum; serta revitalisasi sarana dan prasarana museum.

i. menyelenggarakan pelaksanaan program pengembangan bahasa dan sastra yang meliputi penyusunan kamus besar bahasa daerah; vitalitas, konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah; publikasi bahasa dan sastra daerah; penghargaan tokoh kebahasaan dan kesastraan daerah; penyediaan dan pendistribusian buku cerita rakyat daerah penunjang literasi Kabupaten; peningkatan apresiasi siswa terhadap bahasa dan sastra daerah kewenangan Kabupaten; serta penyusunan modul dan bahan ajar bahasa daerah kewenangan Kabupaten.

j. merumuskan penelitian, pengkajian dan penulisan bidang kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, sejarah dan purbakala.

k. menyelenggarakan pemberian ijin dan rekomendasi bidang kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, sejarah dan purbakala.

https://jdih.pemalangkab.go.id

l. Menyusun konsep kerjasama pengembangan urusan bidang kebudayaan, tradisi,perfilman, kesenian, sejarah dan purbakala
m. melaksanakan pengelolaan resiko operasional atas kegiatan yang dilaksanakan bidang kebudaayaan
n. menyusun konsep inovasi pada Bidang Kebudayaan.
o. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Kebudayaan.
p. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Kebudayaan.
q. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Kebudayaan.
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

2.2 Sumber Daya Disparbud Kabupaten Pemalang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang didukung dengan personalia dan sarana prasarana yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

2.2.1 Sumberdaya Manusia

Tabel 2.1
Sumberdaya Manusia Disparbud Kabupaten Pemalang Tahun 2025

Jumlah Pegawai berdasarkan status Kepegawaian				
No	**Status Kepegawaian**	**Laki-laki**	**Perempuan**	**Jumlah**
1	PNS	32	15	47
2	CPNS	1	2	3
3	PPPK	2	4	6
4	Tenaga Kontrak (Non ASN)	70	20	90
Total		105	41	146

Jumlah Aparatur Berdasarkan Pendidikan		
No	**Tingkat Pendidikan**	**Jumlah**
1	SD	9
2	SMP	6
3	SMA	79
4	DII/DIII/SI	44
5	S2	8
6	S3	0
	Total	146

https://jdih.pemalangkab.go.id

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan		
No	**Golongan**	**Jumlah**
1	Golongan I	0
2	Golongan II	12
3	Golongan III	38
4	Golongan IV	6
	Total	56

Berdasarkan tabel sumber daya manusia (SDM) di atas, SDM Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Pemalang Tahun 2025 merupakan hasil perpaduan antara pegawai yang sebelumnya berada di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Pemalang, khususnya dari bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, unit pengelola obyek wisata, serta sekretariat, dengan pegawai dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pemalang, khususnya dari bidang kebudayaan.

Dari sisi status kepegawaian, jumlah keseluruhan pegawai sebanyak 146 orang, terdiri dari 47 PNS, 3 CPNS, 6 PPPK, dan 90 Tenaga Kontrak (Non ASN). Komposisi pegawai masih didominasi oleh tenaga Tenaga Kontrak (Non ASN) dengan jumlah mencapai 90 orang (61,64%), menunjukkan bahwa penyelenggaraan program dan kegiatan Disparbud masih sangat bergantung pada tenaga pendukung non-ASN. Adapun jumlah pegawai laki-laki lebih banyak, yakni 105 orang, sedangkan perempuan berjumlah 41 orang.

Ditinjau dari tingkat pendidikan, SDM Disparbud sebagian besar berpendidikan menengah (SMA) sebanyak 79 orang (54,11%), sementara yang berpendidikan tinggi (Diploma/D3/S1) mencapai 44 orang, S2 sebanyak 8 orang, dan belum ada yang berpendidikan S3. Sementara itu, masih terdapat pegawai dengan pendidikan dasar (SD sebanyak 9 orang) dan pendidikan menengah pertama (SMP sebanyak 6 orang). Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas SDM masih perlu ditingkatkan melalui pendidikan formal maupun pelatihan teknis agar mampu menjawab tantangan di bidang pariwisata dan kebudayaan yang semakin kompetitif.

Sementara itu, dari pangkat/golongan, terdapat 56 PNS/CPNS dengan distribusi golongan II sebanyak 12 orang, golongan III sebanyak 38 orang, dan golongan IV sebanyak 6 orang, serta tidak ada pegawai yang berada pada golongan I. Komposisi ini menggambarkan bahwa mayoritas ASN berada pada golongan

https://jdih.pemalangkab.go.id

III, yang identik dengan staf pelaksana hingga pejabat fungsional tingkat pertama. Jumlah pejabat dengan golongan IV relatif masih sedikit, sehingga perlu penguatan kaderisasi jabatan fungsional maupun struktural ke depan.

Secara keseluruhan, komposisi SDM Disparbud Kabupaten Pemalang Tahun 2025 menunjukkan keberagaman baik dari segi status kepegawaian, tingkat pendidikan, maupun pangkat/golongan. Namun demikian, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memaksimalkan peran Tenaga Kontrak (Non ASN) yang jumlahnya besar, meningkatkan kompetensi pegawai dengan pendidikan menengah agar lebih profesional, serta mendorong peningkatan karier ASN sehingga struktur organisasi semakin kuat dalam mendukung program prioritas di bidang pariwisata dan kebudayaan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Berikut inventaris barang yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan :

Tabel 2.2
Daftar Barang Inventaris

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi		Keterangan
				Baik	Rusak	
1	Portable Generating Set	2	Unit	P		Genset
2	Portable Water Pump	15	Unit	4	11	Mesin Pompa Air
3	Pompa Air	6	Unit	5	1	Alat Vacum
4	Pompa Lainnya	83	Unit			
5	Station Wagon	11	Unit	P		Kendaraan Roda 4 (Empat)
6	Sepeda Motor	15	Unit	P		14 Kendaraan Roda 2 (Dua) dan 1 Roda 3 (Tiga)
7	Gerobak Dorong	62	Buah	3	59	Gerobak Sampah
8	Alat Angkut Apung Bermotor Untuk Penumpang Lainnya	18	Buah		P	Becak Air
		1	Unit		P	Kapal Wisata
		2	Unit		P	Jet Sky
9	Mesin Kompresor	3	Unit	P		Kompresor
10	Mesin Gergaji	1	Unit		P	Gergaji
11	Alat Ukur Universal Lainnya	1	Unit		P	Hamer Test
12	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	1	Unit		P	Diesel 16 pk
13	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	2	Buah		P	Elektrik Spray
14	Mesin Ketik Manual (Langewagon)	6	Buah		P	Mesin Ketik
15	Mesin Hitung Elektronik/Calkulator	5	Buah		P	Kalkulator
16	Mesin Photocopy	3	Unit	1	2	Mesin Photocopy
17	Lemari Kayu	15	Buah	14	1	Lemari Kayu

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi		Keterangan
				Baik	Rusak	
18	Rak Besi	5	Buah	P		Rak Arsip
19	Rak Kayu	2	Buah	P		Rak Buku
20	Filling Cabinet	14	Buah	P		Filling Cabinet
21	Brandkas	3	Buah	P		Brandkas
22	Papan Visual/Papan Nama	23	Buah	8	15	Papan Informasi
23	White Board	1	Buah	P		Papan Putih
24	Alat Penghancur Kertas	4	Buah	1	3	Penghancur Kertas
25	Mesin Absensi	4	Unit	P		Mesin Absensi
26	Alat Pemotong Kertas	1	Buah		P	Pemotong Kertas
27	LCD Projektor	2	Unit		P	Proyektor
28	Tripod LCD	1	Buah	P		Layar Proyektor
29	Papan Pengumuman	4	Buah	P		Papan Petunjuk
30	Roller Banner	3	Buah		P	Roller Banner
31	Mesin E-Ticketing	9	Unit		P	E-Ticketing
32	Dinamo Filter	2	Unit		P	Dinamo Filter
33	CCTV	14	Unit	1	13	CCTV
34	Meja Kerja	10	Buah	P		Meja Kerja
35	Kursi Metal	9	Buah	5	4	Kursi Besi
36	Kursi Kayu	88	Buah	74	14	Kursi Kayu
37	Meja Rapat	7	Buah	P		Meja Rapat
38	Meja Resepsionis	2	Buah	P		Wisma Jogja
39	Meja Bundar	12	Buah	2	10	Kursi Meja Payung
		2	Buah	P		Meja Tamu
40	Meja 1/2 Biro	67	Buah	65	2	Meja Kerja
41	Kasur/Spring Bad	15	Buah	P		Wisma Jogja
42	Kursi Rapat	430	Buah	109	321	Kursi Rapat
43	Kursi Tamu	2	Buah	P		Kursi Tamu
44	Kursi Putar	15	Buah	11	4	Kursi Putar
		3	Buah	P		Wisma Jogja
45	Meja Komputer	3	Buah	P		Meja Komputer
46	Sofa	6	Buah	3	3	Sofa
47	Jam Mekanis	4	Buah	2	2	Jam Dinding
48	Mesin Penghisap Debu	2	Buah	1	1	Vacum Cleaner
		6	Buah		Tidak Ada	Vacum Hose Duraking
		3	Buah		Tidak Ada	Vacum Head Astral
		3	Buah		Tidak Ada	Vinnil Liner Vacum
52	Mesin Potong Rumput	32	Unit	4	28	Mesin Potong
53	Vacum Clenner	2	Buah	P		Sikat Vacum
		2	Buah	P		Stick Vacum
		2	Buah	P		Selang Spiral
54	Lemari Es	4	Unit	P		Kulkas
55	AC	33	Unit	15	18	AC
56	Kipas Angin	9	Buah	5	4	Kipas Angin
57	Alat Pendingin	1	Unit	P		Showcase
58	Kompor Gas	1	Buah	P		Kompor Gas
59	Kichen Set	1	Buah	P		Wisma Jogja
60	Tabung Gas	1	Buah	P		Tabung Gas
61	Rak Piring	1	Buah	P		Rak Piring
62	Nampan	2	Buah	P		Nampan
63	Tatakan dan Tutup Gelas	1	Set	P		Tatakan dan Tutup Gelas
64	Sendok	20	Buah	P		Sendok

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi		Keterangan
				Baik	Rusak	
65	Panci	1	Buah	P		Panci
66	Ceret	1	Buah		Tidak ada	Ceret
67	Piring Kue	2	Buah	P		Piring Kue
68	Piring	2	Set	P		Piring
69	Gelas	2	Set	P		Gelas
70	Televisi	27	Unit	7	20	Televisi
71	Tape Recorder	1	Unit		P	Tape Recorder
72	Amplifier	3	Unit			Amplifier
73	Loudspeaker	4	Unit		Tidak ada	Loudspeaker
		2	Unit	P		Loudspeaker
75	Sound System	2	Unit		P	Tweiter
		4	Unit		P	Control Musik
		1	Unit		Tidak Ada	
		1	Unit			Peralatan Sound System
		5	Unit			Horn Speaker
		1	Unit			Sound Audio
		1	Unit			Audio Mixer
82	Wirelles	4	Unit			Wirelles
83	Unit Power Supply	9	Unit	6	3	Unit Power Supply
84	Stabilisator	1	Unit		P	Stabilisator
85	Camera Video	2	Unit	1	1	Camera Shooting
		1	Unit	P		4 Camera CCTV Wisma Jogja
87	Tustel	1	Unit		Tidak Ada	Camera Digital
88	Tangga Aluminium	2	Buah	P		Tangga Aluminium
89	Dispenser	4	Buah	2	2	Dispenser
90	Mimbar Podium	2	Buah	P		Mimbar Upacara
91	Handycam	4	Unit		P	Handycam
92	Lampu	61	Buah	P		Lampu Penerangan Taman
93	Tangki Air	1	Buah	P		Tangki Air
94	Meja Bilyard	1	Buah		P	Meja Bilyard
95	Lampu Grambyong	1	Buah		P	Tidak Ada
96	Lampu Gantung	1	Buah		P	Tidak Ada
97	Taplak	1	Lusin	P		Taplak
98	Toples	1	Set	P		Toples
99	Bantal Kursi	1	Set	P		Bantal Kursi
100	Sarung Bantal Kursi	1	Set	P		Sarung Bantal Kursi
101	Pot Gerabah	4	Buah			Tidak Ada
102	Asbak	1	Lusin			Tidak Ada
103	Karpet	40	Meter			Hilang
104	Termos	2	Buah	P		Termos
105	Magicom	1	Buah	P		Magicom
106	Avo Meter	1	Unit	P		Avo Meter
107	Pompa Dorong	1	Unit	P		Wisma Jogja
108	Apar	5	Buah	P		Apar
109	Meja Kerja Pejabat	5	Buah	P		Meja Kerja Pejabat
110	Meja Kerja Non Struktural	2	Buah	P		Meja Kerja Non Struktural
111	Meja Tamu Biasa	5	Buah	P		Meja Tamu Biasa
112	Meja Maket/Peta	1	Buah	P		Meja Maket/Peta
113	Kursi Kerja Pejabat	8	Buah	P		Kursi Kerja Pejabat
114	Lemari Buku	1	Buah	P		Lemari Buku

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi		Keterangan
				Baik	Rusak	
115	Lemari Buku Arsip	7	Buah	P		Lemari Arsip
116	Bufet Kayu	3	Buah	P		Bufet Kayu
117	Bufet Kaca	2	Buah	P		Bufet Kaca
118	Microphone/Wireless Mic	3	Unit	P		Microphone/Wireless Mic
119	Camera Elektronik	3	Unit	2	1	Camera Elektronik
120	Tripod Camera	1	Buah	P		Tripod Camera
121	Water Heater	1	Buah	P		Wisma Jogja
122	Layar Film/Projektor	4	Unit	1	3	LCD Projektor
		2	Buah	P		Layar Proyektor
123	Pesawat Telephon	3	Buah	1	2	Telephone
124	Handy Talky (HT)	4	Unit			Tidak Ada
125	Faximile	2	Unit		P	Faximile
126	Server Internet	4	Unit	P		Server
127	PC Unit	14	Unit	7	7	PC Komputer
128	Laptop	49	Unit	37	8	4 Dalam Penelusuran
129	Note Book	6	Unit		P	3 Dalam Penelusuran
130	Dekstop	3	Unit	1	2	Dekstop
131	CPU	1	Unit	P		CPU
132	Monitor	2	Unit	P		Monitor LCD
133	Printer	44	Unit	25	19	Printer
134	Scanner	1	Unit	P		Scanner
135	Rambu Penunjuk Obyek	9	Buah	P		Rambu Penunjuk Obyek
136	Bangunan	8	Unit	6	2	
137	Situs	3	Unit	3		
138	Dalang/Wayang	8	Buah			
139	Tembang Jawa/Karawitan	40		40		
140	Sintren	4		4		
141	Kuda Kepang	24		24		
142	Campursari	4		4		
143	Sanggar Tari	24		24		
144	Tradisional	1		1		

2.3 Kinerja Pelayanan Disparbud Kabupaten Pemalang

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan kebudayaan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Disparbud memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk fasilitasi pengembangan daya tarik wisata, peningkatan nilai-nilai kebudayaan di Kabupaten Pemalang

Kegiatan pelayanan pada bidang pariwisata meliputi fasilitasi promosi dan pengembangan destinasi wisata, pembinaan desa wisata, penguatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif, serta pengelolaan event kepariwisataan. Pada bidang kebudayaan :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pengelolaan kebudayaan, masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota, Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota, Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota, Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota, Pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota, Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota, Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota, Penerbitan izin membawa, Cagar budaya ke luar Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, Pengelolaan museum kabupaten/kota.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang sangat bergantung pada dukungan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten, tersedianya infrastruktur pendukung, serta keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan. Untuk mengukur capaian kinerja pelayanan Disparbud, digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disusun secara terukur, relevan, dan akuntabel.

Indikator Kinerja Utama Disparbud Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029 mengalami penyesuaian dibandingkan periode sebelumnya (2021–2026), dengan menekankan pada peningkatan PAD sektor pariwisata, peningkatan kunjungan wisatawan di Kabupaten Pemalang, serta pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan di Kabupaten Pemalang

Capaian kinerja layanan selama periode 2020–2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.3.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun					Pertumbuhan Kinerja				Rata-Rata
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	%	-28.84	-8.42	89.938	-24.2	0.7793	-70.80	-1168.14	-126.91	-103.22	-367.27
2	Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara perkebangsaan	%	0	0	100	-16.67	90	0.00	0.00	-116.67	-640.00	-189.17
3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kab/Kota	%	-28.84	-8.42	91.29	-24.2	0.7785	-70.80	-1184.20	-126.51	-103.22	-371.18
4	Persentase tingkat hunian akomodasi	%	0	0	32.49	32.141	35.055	0.00	0.00	-1.07	9.07	2.00
5	Persentase kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD	%	0.383	0.222	0.45	0.306	0.348	0.00	0.00	-32.00	13.71	-4.57
6	Persentase perkembangan sub sektor ekonomi kreatif potensial	%	0	0	58.33	66.67	75	0.00	0.00	14.30	12.49	6.70
7	Persentase warisan budaya yang ditetapkan	%	0	3,26	3,26	3,5	3,5	0	88.34	6.35	20.83	90.52
8	Cakupan warisan budaya yang dilestarikan	%	0	100	100	100	100	0	16.41	10.47	0.00	1.88
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	69.48	70.37	73.9	79.39	85.06	1.28	5.02	7.43	7.14	5.22

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun					Pertumbuhan Kinerja				Rata-Rata
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
10	Nilai komponen Akuntabilitas Kinerja	Skor	55.05	58.07	62.6	65.6	66.22	5.49	7.80	4.79	0.95	4.76
11	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Rupiah	1,256, 533,000	812, 055,000	1,517 ,866,000	1,088, 935,550	1,385, 170,500	-35,37	86,92	-28,26	27,20	12,62

https://jdih.pemalangkab.go.id

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang selama periode 2020–2024 menunjukkan adanya dinamika perkembangan yang signifikan di berbagai bidang, meskipun terdapat beberapa indikator yang mengalami fluktuasi tajam sebagai dampak dari tantangan eksternal maupun internal yang dihadapi selama lima tahun terakhir.

Di bidang pariwisata, indikator Indikator Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan pada periode tahun 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, pertumbuhan wisatawan mengalami penurunan yang cukup tajam sebesar -28,84%, yang disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas perjalanan wisata. Kondisi tersebut berlanjut pada tahun 2021, meskipun dengan penurunan yang lebih kecil yaitu -8,42%.

Memasuki tahun 2022, terjadi lonjakan pertumbuhan wisatawan yang cukup tinggi, yakni sebesar 89,94%, seiring dengan mulai pulihnya sektor pariwisata, dibukanya kembali destinasi wisata, serta meningkatnya mobilitas masyarakat. Namun demikian, pada tahun 2023 kembali terjadi penurunan yang signifikan sebesar -24,2%, yang menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga stabilitas pertumbuhan kunjungan wisatawan.

Di tahun 2024, pertumbuhan wisatawan relatif stagnan dengan capaian hanya 0,78%, yang berarti peningkatan jumlah kunjungan wisatawan belum signifikan. Rata-rata pertumbuhan selama periode 2020–2024 tercatat masih negatif, yaitu -367,27%, menandakan bahwa secara umum sektor pariwisata Kabupaten Pemalang masih menghadapi fluktuasi tinggi dan membutuhkan strategi yang lebih konsisten dalam menjaga tren pertumbuhan jumlah wisatawan.

Sementara itu, tingkat hunian akomodasi menunjukkan tren positif, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,00% per tahun. Hal ini menjadi sinyal bahwa sektor akomodasi perlahan mulai pulih dan berkontribusi dalam menarik kunjungan wisatawan. Namun, kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD masih menunjukkan fluktuasi dan pertumbuhan yang kurang stabil,

https://jdih.pemalangkab.go.id

menandakan perlunya peningkatan manajemen dan promosi retribusi objek wisata sebagai sumber pendapatan daerah.

Sektor ekonomi kreatif mengalami perkembangan yang positif. Indikator persentase perkembangan subsektor ekonomi kreatif potensial mencatat rata-rata pertumbuhan sebesar 6,70% per tahun, menunjukkan adanya penguatan sektor kreatif sebagai alternatif penggerak ekonomi daerah.

Di bidang Kebudayaan, dalam rangka meningkatkan pelestarian budaya, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan target indikator persentase warisan budaya yang ditetapkan sebesar 3,26% pada tahun 2021 hingga 3,5% pada tahun 2025. Realisasi capaian menunjukkan tren yang sangat positif, yaitu dari 3,26% pada tahun 2021 meningkat menjadi 6,14% pada tahun 2022, 6,53% pada tahun 2023, hingga mencapai 7,89% pada tahun 2024. Capaian ini jauh melampaui target yang ditetapkan setiap tahunnya, dengan rasio capaian mencapai lebih dari 180% hingga 225%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penetapan warisan budaya di Kabupaten Pemalang berjalan dengan sangat baik dan konsisten, melebihi ekspektasi perencanaan.

Sementara itu, pada indikator cakupan warisan budaya yang dilestarikan, target yang ditetapkan setiap tahunnya adalah 100%. Realisasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dari 77,76% pada tahun 2021, menjadi 90,52% pada tahun 2022, dan berhasil mencapai 100% pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh warisan budaya yang telah ditetapkan berhasil dilestarikan dengan baik sehingga selaras dengan tujuan pembangunan daerah dalam menjaga identitas dan nilai budaya masyarakat Pemalang.

Secara umum, capaian kinerja pelestarian budaya di Kabupaten Pemalang menunjukkan hasil yang sangat baik, bahkan melampaui target yang direncanakan. Keberhasilan ini tidak hanya memperkuat identitas budaya lokal, tetapi juga menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan sektor pariwisata dan kebudayaan di daerah.

Dari sisi pelayanan publik dan tata kelola, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai Komponen Akuntabilitas Kinerja menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan positif, dengan masing-masing rata-rata pertumbuhan 5,22 dan 4,76 per tahun.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Hal ini menjadi refleksi atas perbaikan kinerja pelayanan publik dan sistem pertanggungjawaban kinerja di lingkungan Disparbud.

Pada tahun 2020 dan 2021, terdapat beberapa indikator kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang yang menunjukkan capaian 0 (nol). Hal ini bukan berarti tidak adanya pelaksanaan kegiatan, melainkan karena data pengukuran indikator belum tersedia atau belum dilakukan pencatatan secara sistematis pada periode awal. Beberapa faktor penyebabnya antara lain:

1. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara per kebangsaan – Pada tahun 2020 dan 2021 belum terdapat pencatatan kunjungan wisatawan mancanegara secara terpilah per kewarganegaraan. Hal ini juga dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang membatasi akses kedatangan wisatawan asing.
2. Persentase tingkat hunian akomodasi – Pengumpulan data akomodasi pariwisata baru dilakukan mulai tahun 2022. Sebelum itu, sistem pencatatan hunian kamar hotel maupun penginapan belum terintegrasi secara resmi pada perangkat daerah.
3. Persentase perkembangan subsektor ekonomi kreatif potensial – Pendataan terkait subsektor ekonomi kreatif baru mulai difokuskan pada tahun 2022. Sebelumnya, sektor ini belum menjadi indikator kinerja yang diukur secara kuantitatif.
4. Persentase warisan budaya yang ditetapkan – Pada tahun 2020 belum ada warisan budaya yang resmi ditetapkan, sementara pada tahun 2021 baru mulai dilakukan penetapan awal, sehingga data capaian baru muncul setelahnya.
5. Cakupan warisan budaya yang dilestarikan – Pengukuran cakupan warisan budaya baru dimulai pada tahun 2021, seiring dengan adanya kegiatan inventarisasi dan pelestarian cagar budaya daerah.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kabupaten Pemalang pada periode tahun 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2020 realisasi PAD tercatat sebesar Rp1.256.533.000, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi Rp812.055.000 atau turun sekitar 35,37%. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh masih terbatasnya aktivitas wisata

https://jdih.pemalangkab.go.id

akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada tingkat kunjungan wisatawan dan pemanfaatan fasilitas olahraga.

Pada tahun 2022, kinerja PAD kembali meningkat signifikan hingga mencapai Rp1.517.866.000 atau tumbuh sekitar 86,92% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini sejalan dengan mulai pulihnya kegiatan wisata, dibukanya kembali destinasi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berwisata lokal.

Namun, pada tahun 2023 capaian PAD kembali mengalami penurunan menjadi Rp1.088.935.550 atau turun sebesar 28,26%. Penurunan ini menunjukkan masih adanya ketergantungan yang tinggi pada jumlah kunjungan wisatawan serta pengaruh kondisi ekonomi masyarakat terhadap daya beli wisata.

Di tahun 2024, realisasi PAD meningkat kembali menjadi Rp1.385.170.500, atau naik sebesar 27,20% dibandingkan tahun 2023. Secara rata-rata, pertumbuhan PAD retribusi tempat rekreasi dan olahraga selama periode 2020–2024 tercatat sebesar 12,62%, yang menunjukkan tren positif meskipun diwarnai fluktuasi setiap tahunnya.

Secara keseluruhan, analisis pertumbuhan kinerja Disparbud Kabupaten Pemalang mengindikasikan perlunya upaya akselerasi pemulihan sektor pariwisata, serta pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan di Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.4.

Evaluasi Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Urusan Pariwisata) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Urusan Kebudayaan) Kabupaten Pemalang Periode 2021-2026

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun ke-						Realisasi Capaian Pada Tahun ke-				Rasio Capaian Pada Tahun ke-			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Presentase Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Kunjungan Wisata		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10,00	100,00	100,00	100,00
3	Prosentase Objek Wisata yang dipromosikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100
4	Prosentasi Sarana dan Prasarana Ekraf yang dimanfaatkan	%	20	40	60	70	80	100	20	0	0	30	100,00	0	0	30
5	Persentase Tenaga Kerja di sektor Priwisata yang disertifikasi	%	45,6	49,6	53,6	57,6	61,6	65,6	45,6	43	9,6	10,97	100,00	86,69	17,91	19,05
6	Persentase capaian perencanaan dan keuangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase capaian layanan umum dan kepegawaian	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	%	10	10	10	10	10	10	-8,42	89,94	-24,20	0,78	-84,20	899,38	-242,03	7,79
9	Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara perkebangsaan	%	0	100	50	33,3	50	50	0	100	-16,67	90,00	0	100,00	-33,33	270,27
10	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kab/Kota	%	10	10	10	10	10	10	-8,42	91,29	-24,20	0,78	-84,20	912,90	-242,03	7,79
11	Persentase tingkat hunian akomodasi	%	25,38	26,65	29,32	32,25	35,47	39,02	0	32,49	32,14	35,06	0	121,91	109,62	108,70
12	Persentase kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD	%	0,48	0,50	0,55	0,6	0,66	0,73	0	0,45	0,31	0,35	0	90,00	55,64	57,99

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun ke-						Realisasi Capaian Pada Tahun ke-				Rasio Capaian Pada Tahun ke-			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
13	Persentase perkembangan sub sektor ekonomi kreatif potensial	%	50,00	58,33	66,67	75	87,50	100,00	0,00	58,33	66,67	75,00	0	100,00	100,00	100,00
14	Persentase warisan budaya yang ditetapkan	%	3,26	3,26	3,5	3,5	3,5	3,5	3,26	6,14	6,53	7,89	100,00	188,34	186,57	225,43
15	Cakupan warisan budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100	100	77,76	90,52	100	100	77,76	90,52	100,00	100,00
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	70	72	75	85	86	87	70,37	73,9	79,39	85,06	100,53	102,64	105,85	100,07
17	Nilai komponen Akuntabilitas Kinerja	Skor	58,02	60	62,5	66	66,5	68	58,07	62,6	65,6	66,22	100,09	104,33	104,96	100,33

https://jdih.pemalangkab.go.id

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan, secara umum capaian kinerja Dinas Pariwisata dan kebudayaan (urusan pariwisata) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (urusan kebudayaan) Kabupaten Pemalang pada periode 2021–2024 menunjukkan variasi capaian yang berbeda pada tiap indikator.

Indikator persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah, capaian perencanaan dan keuangan, serta capaian layanan umum dan kepegawaian secara konsisten mencapai 100% sesuai target setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa aspek tata kelola dan dukungan urusan pemerintahan telah berjalan dengan baik dan akuntabel.

Pada indikator kunjungan wisata, capaian tahun 2021 masih sangat rendah (10%) dari target 100%, namun pada tahun-tahun berikutnya sudah mencapai target 100%. Hal serupa juga terlihat pada persentase objek wisata yang dipromosikan yang konsisten mencapai target 100%. Indikator sarana dan prasarana ekonomi kreatif yang dimanfaatkan juga sudah sesuai target pada tahun awal (20%), namun pada tahun-tahun berikutnya masih perlu optimalisasi agar sesuai dengan proyeksi renstra.

Untuk indikator tenaga kerja sektor pariwisata yang disertifikasi, capaian 2021 sesuai target (45,6%), namun pada tahun 2022–2024 capaian mengalami fluktuasi dan berada di bawah target, sehingga masih memerlukan peningkatan pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi sertifikasi kompetensi.

Dari sisi pertumbuhan jumlah wisatawan dan peningkatan perjalanan wisatawan nusantara, capaian sangat fluktuatif bahkan sempat negatif pada tahun 2021 dan 2023. Namun, pada tahun 2022 indikator ini melonjak tinggi hingga di atas 800%, yang menunjukkan adanya dinamika kondisi eksternal seperti pemulihan pasca pandemi COVID-19 dan faktor kebijakan destinasi. Sementara untuk kunjungan wisatawan mancanegara per kebangsaan, capaian menunjukkan peningkatan signifikan di tahun 2022 (100%) meskipun masih belum stabil di tahun berikutnya.

Indikator tingkat hunian akomodasi cenderung mengalami peningkatan, di mana capaian tahun 2022–2024 berada di atas target dengan rasio capaian di atas 100%. Demikian juga indikator kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD masih relatif rendah

https://jdih.pemalangkab.go.id

dan fluktuatif (0,31%–0,45%), sehingga diperlukan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi.

Pada aspek pengembangan subsektor ekonomi kreatif potensial, capaian menunjukkan perkembangan yang signifikan. Jika pada tahun 2021 belum ada capaian, maka sejak 2022 hingga 2024 target tercapai 100%. Hal ini menjadi peluang besar dalam pengembangan ekraf lokal sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

Untuk urusan kebudayaan, indikator persentase warisan budaya yang ditetapkan melampaui target secara konsisten dengan rasio capaian di atas 180% bahkan mencapai 225% pada tahun 2024. Begitu juga dengan cakupan warisan budaya yang dilestarikan yang meningkat dari 77,76% pada 2021 menjadi 100% pada 2023 dan 2024. Hal ini menunjukkan komitmen kuat Kabupaten Pemalang dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah.

Sementara itu, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan tren yang meningkat, dari 70,37 di tahun 2021 menjadi 85,06 pada tahun 2024, melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini sejalan dengan perbaikan layanan publik pada sektor pariwisata dan kebudayaan. Demikian pula dengan nilai komponen Akuntabilitas Kinerja, yang meningkat dari 58,07 pada tahun 2021 menjadi 66,22 pada tahun 2024, seluruhnya di atas target, menandakan tata kelola kinerja perangkat daerah yang semakin baik.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja pada periode 2021–2024 menunjukkan hasil yang bervariasi. Beberapa indikator sudah konsisten mencapai atau bahkan melampaui target, khususnya pada aspek warisan budaya, objek wisata yang dipromosikan, dan layanan publik. Namun, beberapa indikator lain seperti pertumbuhan wisatawan, kontribusi retribusi pariwisata, serta sertifikasi tenaga kerja pariwisata masih memerlukan perhatian dan strategi khusus agar lebih optimal.

Pencapaian target kinerja tidak lepas dari faktor pendanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 2021-2026. Adapun pendanaan program kegiatan beserta realisasinya secara rinci tercantum pada tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.5.

Realisasi Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000) Berdasarkan Dok Renstra				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)				Persentase Realisasi Anggaran (%)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10,811,720,000	10,811,720,000	10,811,720,000	10,811,720,000	7,994,100,815	9,676,908,304	9,336,944,356	8,936,171,166	73.94	89.50	86.36	82.65
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	8,970,000,000	8,970,000,000	8,970,000,000	8,970,000,000	3,047,440,450	2,804,807,518	1,035,070,854	1,578,575,847	33.97	31.27	11.54	17.60
3	Program Pemasaran Pariwisata	450,000,000	450,000,000	450,000,000	450,000,000	302,934,880	417,831,486	199,389,734	-	67.32	92.85	44.31	-
4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	11,925,000	-	-		19.88	-	-	-
5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	930,000,000	930,000,000	930,000,000	930,000,000	300,533,000	160,370,270	337,673,500	1,864,674,048	32.32	17.24	36.31	200.50
6	Program Pengembangan Kebudayaan	450,673.000	526,303.350	11,014,325.000	1,851,702.000	447,420.640	474,040.877	7,630,733.758	1,740,826.638	99.3	90.1	69.3	94.0
7	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000) Berdasarkan Dok Renstra				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)				Persentase Realisasi Anggaran (%)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
8	Program Pembinaan Sejarah	65,378.000	39,042.250	648,975.400	228,874.000	64,432.291	38,079.750	619,788.088	180,867.004	98.6	97.5	95.5	79.0
9	Program Pelstarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	706,712.000	350,230.400	1,211,699.600	4,143,613.870	688,601.658	348,893.287	1,003,937.273	3,890,636.386	97.4	99.6	82.9	93.9
10	Program Pengelolaan Permuseuman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.4 Kelompok Sasaran Layanan serta Mitra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata di Kabupaten Pemalang memerlukan strategi yang menyeluruh, dengan fokus pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif lokal. Optimalisasi potensi wisata yang dimiliki daerah harus didukung oleh layanan publik yang responsif, promosi yang efektif, dan kemitraan lintas sektor. Dengan membangun ekosistem pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan, Kabupaten Pemalang tidak hanya mampu meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga membuka lapangan kerja, mendorong inovasi lokal, dan memperkuat identitas budaya. Untuk itu, diperlukan identifikasi kelompok sasaran layanan utama serta keterlibatan aktif mitra strategis yang memiliki peran signifikan dalam rantai nilai pariwisata dan ekonomi kreatif.

Kelompok Sasaran Layanan:

1. Pelaku Usaha Pariwisata

   Hotel, penginapan, restoran, biro perjalanan, penyedia transportasi wisata yang menjadi penyumbang langsung pajak dan retribusi.
2. Pelaku Ekonomi Kreatif Lokal

   UMKM kuliner, fashion, kriya, seni pertunjukan, video/film, fotografi, dan digital content creator yang menambah nilai dan daya tarik wisata.
3. Pengelola dan Komunitas Desa Wisata

   Sebagai pelaksana layanan berbasis komunitas yang mendukung wisata berbasis alam, budaya, dan pengalaman.
4. Masyarakat Lokal di Sekitar Destinasi Wisata

   Termasuk pelaku informal (penjual makanan, parkir, jasa pemandu lokal) yang berkontribusi langsung pada kenyamanan wisatawan.
5. Wisatawan Domestik dan Mancanegara

   Target penerima layanan dan kontributor utama terhadap transaksi ekonomi pariwisata di daerah.
6. Pemuda dan Komunitas Kreatif

   Sebagai penggerak inovasi, promosi digital, event kreatif, serta pelaku start-up wisata dan ekraf.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Mitra Strategis:

1. Perangkat Daerah Teknis Terkait
   a. Bappeda, BPKAD, Dinas PUPR, Dishub, DLH, Disperindag, DPMPTSP, Dinkop UKM
      Mendukung regulasi, infrastruktur, perizinan, pembiayaan, dan pembinaan pelaku usaha.
2. BUMDes dan Pokdarwis
   Mengelola potensi wisata lokal secara kolektif berbasis masyarakat dan mendukung ekonomi desa.
3. Asosiasi Pariwisata dan Ekraf
   PHRI, ASITA, HPI, GenPI, Forum Ekraf Daerah untuk kolaborasi promosi, peningkatan kapasitas, dan standarisasi layanan.
4. Investor dan Dunia Usaha
   Mendorong investasi di sektor perhotelan, atraksi wisata, dan pengembangan kawasan wisata tematik.
5. Lembaga Keuangan dan Perbankan
   Mendukung pembiayaan usaha kecil sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui KUR, koperasi, dan skema lain.
6. Media Massa dan Influencer Digital
   Mitra utama dalam promosi destinasi, storytelling digital, dan kampanye branding pariwisata Pemalang.
7. Akademisi, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Pelatihan
   Menyediakan riset, pelatihan, dan pendampingan bagi SDM pariwisata dan ekraf lokal.

Dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan di Kabupaten Pemalang, keterlibatan berbagai pihak menjadi faktor yang sangat penting. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri, melainkan perlu membangun kolaborasi dengan kelompok sasaran dan mitra strategis agar program kebudayaan dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.

Kelompok Sasaran Layanan Urusan Kebudayaan :

1. Seniman dan budayawan (perupa, musisi tradisional, maestro seni, penulis).
2. Sanggar seni dan komunitas budaya (tari, teater, karawitan, sintren, kuda kepang, campursari, dll.).
3. Lembaga adat dan tokoh masyarakat.

https://jdih.pemalangkab.go.id

4. Pelajar, mahasiswa, dan generasi muda.
5. Masyarakat umum sebagai penerima manfaat kegiatan budaya.
6. Pelaku ekonomi kreatif berbasis budaya (kriya, kuliner tradisional, fashion etnik, dll.).

Mitra Urusan Kebudayaan :

1. Pemerintah pusat dan provinsi
2. Perangkat daerah terkait (Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian/Perdagangan).
3. Dewan Kesenian, Dewan Kebudayaan, dan Dekranasda.
4. Lembaga pendidikan dan perguruan tinggi (sekolah, universitas, sanggar pendidikan seni).
5. Lembaga adat, komunitas, dan organisasi budaya lokal.
6. Media massa dan komunitas digital.
7. Sektor swasta dan dunia usaha (dukungan CSR, sponsorship, kemitraan).
8. Komunitas diaspora dan pegiat budaya di luar daerah maupun luar negeri.

2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang

2.5.1 Permasalahan

Permasalahan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang merupakan gap atau perbedaan antara kinerja pengelolaan sektor pariwisata dan kebudayaan dengan kondisi ideal yang dapat dicapai. Identifikasi permasalahan dalam pengelolaan sektor tersebut sangat bermanfaat dalam merumuskan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif terhadap berbagai kondisi yang tidak diharapkan di masa mendatang. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pariwisata dan kebudayaan dapat berjalan secara lebih efektif dan optimal.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.6.

Perumusan Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang

Urusan	Sub Urusan	Kewenangan	Indikator	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Pariwisata	Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Daya tarik objek wisata milik pemerintah daerah yang kurang optimal	1. Objek wisata milik pemerintah daerah belum mampu menarik minat kunjungan secara maksimal. 2. Fasilitas dan infrastruktur pendukung objek wisata masih kurang memadai. 3. Promosi dan pemasaran destinasi wisata belum dilakukan secara optimal. 4. Inovasi dan pengembangan daya tarik wisata berjalan lambat. 5. Keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan wisata masih rendah. 6. Sumber daya manusia pengelola objek wisata masih belum profesional.	1. Terbatasnya alokasi anggaran untuk pengembangan dan pemeliharaan objek wisata. 2. Kurangnya strategi promosi terpadu dan pemanfaatan media digital. 3. Tidak adanya riset pasar dan data pengunjung sebagai dasar pengembangan objek wisata. 4. Lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan komunitas lokal. 5. Minimnya pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM pariwisata daerah. 6. Belum adanya inovasi konten wisata atau pembaruan atraksi yang menarik dan kekinian.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Urusan	Sub Urusan	Kewenangan	Indikator	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan			

https://jdih.pemalangkab.go.id

Urusan	Sub Urusan	Kewenangan	Indikator	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif potensial di Kabupaten Pemalang	Belum dilakukanya fasilitasi akses pasar ekonomi kreatif	1. Belum dilakukannya fasilitasi akses pasar bagi pelaku ekonomi kreatif. 2. Produk ekonomi kreatif lokal kurang dikenal dan kurang terserap pasar. 3. Minimnya kegiatan promosi dan pemasaran produk ekonomi kreatif. 4. Keterbatasan jejaring pelaku ekonomi kreatif dengan pasar yang lebih luas.	1. Belum adanya program atau kebijakan khusus untuk mendukung akses pasar pelaku ekonomi kreatif. 2. Kurangnya sinergi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, platform digital, dan pelaku industri. 3. Terbatasnya pemahaman pelaku ekonomi kreatif terkait strategi pemasaran dan branding produk. 4. Minimnya event, expo, atau pameran sebagai ruang temu antara produsen dan konsumen. 5. Infrastruktur pendukung seperti platform digital promosi atau marketplace lokal belum tersedia atau belum dimanfaatkan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Urusan	Sub Urusan	Kewenangan	Indikator	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kebudayaan	Kebudayaan	Kebudayaan	1. Pemajuan Kebudayaan 2. Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	Belum optimal pelestarian cagar budaya	Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang belum teregister dengan baik	Jumlah personil terbatas, dan baru terbentuk tim ahli cagar budaya

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.5.2 Isu Strategis

Isu strategis dapat diidentifikasi melalui analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*). Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*) merupakan faktor internal yang memengaruhi kinerja urusan pariwisata dan kebudayaan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang. Sedangkan Peluang (*Opportunity*) dan Tantangan (*Threat*) merupakan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan strategis, yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan sektor ini di masa mendatang.

Identifikasi faktor-faktor SWOT sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi, baik yang sedang terjadi maupun yang berpotensi muncul. Dengan memahami kekuatan yang dimiliki, kelemahan yang perlu dibenahi, serta peluang yang bisa dimanfaatkan dan tantangan yang perlu diantisipasi, maka perencanaan pembangunan sektor pariwisata dan kebudayaan dapat disusun secara lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, analisis SWOT menjadi salah satu dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang tahun 2025–2029, agar mampu berkontribusi secara optimal dalam pencapaian visi pembangunan daerah. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran obyektif terhadap kapasitas dan posisi strategis organisasi, serta menjadi dasar dalam merumuskan isu-isu strategis yang dijadikan acuan dalam arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan. Dengan demikian, perencanaan dapat disusun secara tepat sasaran, adaptif, dan berkelanjutan sesuai dinamika kebutuhan dan harapan masyarakat Kabupaten Pemalang. Adapun analisis SWOT sebagai berikut :

A. Kekuatan / Potensi (*Strength*):

- Potensi wisata yang beragam
  Tersedianya objek wisata alam, budaya, dan buatan yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Pemalang.
- Kekayaan Budaya Lokal
  Adanya tradisi, kesenian daerah, dan warisan budaya tak benda yang menjadi identitas masyarakat.

https://jdih.pemalangkab.go.id

- Komitmen organisasi
  Adanya komitmen pimpinan dan pegawai dalam pengembangan sektor pariwisata dan kebudayaan.
- Kolaborasi dengan komunitas
  Terbangunnya sinergi dengan komunitas, pelaku ekonomi kreatif, dan pelaku seni dalam mendukung kegiatan Disparbud
- Program pembinaan yang berjalan
- Terselenggaranya pembinaan, pelatihan, serta festival budaya secara rutin.
- Kesadaran masyarakat yang meningkat
  Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata dan kegiatan pelestarian budaya.

B. Kelemahan (*Weakness*):

- Promosi wisata belum optimal
  Masih kurangnya pemanfaatan media digital untuk promosi destinasi wisata daerah.
- Sarana dan prasarana terbatas
  Fasilitas penunjang kegiatan wisata dan kebudayaan masih belum memadai.
- Keterbatasan SDM profesional
  Kurangnya tenaga terampil di bidang pemandu wisata, pengelola destinasi, kurator budaya, dan pelaku seni.
- Pembinaan belum berjenjang dan terstruktur
  Belum optimalnya pola pembinaan terhadap seniman, sanggar, dan komunitas budaya secara berkelanjutan.
- Fasilitasi ekonomi kreatif belum maksimal
  Akses pasar dan pendampingan terhadap pelaku ekonomi kreatif lokal masih belum berjalan efektif.
- Data belum terintegrasi
  Lemahnya pengelolaan dan pemetaan data potensi wisata dan budaya secara digital dan terpadu.

C. Peluang (*Opportunity*):

- Perkembangan teknologi digital
  Dapat dimanfaatkan untuk promosi wisata, pemasaran produk kreatif, dokumentasi, dan digitalisasi budaya.
- Dukungan program nasional

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tersedianya program pemerintah pusat seperti pengembangan desa wisata, penetapan warisan budaya tak benda, dan fasilitasi ekonomi kreatif.

- Dukungan lintas sektor dan CSR
  Potensi kemitraan dengan sektor swasta, BUMD, atau lembaga lain melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
- Minat masyarakat meningkat
  Antusiasme masyarakat terhadap wisata lokal, event budaya, dan pelestarian tradisi semakin tinggi.
- Potensi wisata tematik dan budaya
  Kabupaten Pemalang memiliki peluang besar mengembangkan pariwisata berbasis tema edukatif, sejarah, dan budaya lokal.

D. Tantangan / Ancaman (*Threat*):

- Persaingan antar daerah
  Kabupaten lain juga berlomba mempromosikan wisata sehingga diperlukan inovasi dan daya saing tinggi.
- Perubahan tren wisata dan budaya
  Preferensi wisatawan dan minat generasi muda terhadap budaya lokal cepat berubah sehingga menuntut inovasi.
- Ancaman terhadap lingkungan wisata dan budaya
  Alih fungsi lahan, urbanisasi, dan modernisasi berpotensi mengganggu kelestarian wisata dan warisan budaya.
- Rendahnya partisipasi masyarakat
  Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga destinasi wisata serta mendukung pelestarian budaya.
- Keterbatasan anggaran
  Anggaran yang minim berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan program prioritas.
- Kurangnya kesinambungan program
  Banyak kegiatan masih bersifat musiman atau seremonial tanpa penguatan keberlanjutan dan dampak jangka panjang.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.7.

Isu Strategis

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Pemalang

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			ISU Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
- 16 Daya Tarik Wisata Alam - 6 Daya Tarik Wisata Tirta - 2 Daya Tarik Wisata Edukasi - 1 Daya Tarik Agrowisata - 2 Daya Tarik Wisata Religi - 1 Daya Tarik Wisata Minat Khusus - 5 Event/ Festival Daerah - 36 Desa Wisata	Daya tarik objek wisata milik pemerintah daerah yang kurang optimal	Masih rendahnya kontribusi pariwisata terhadap ekonomi	Perubahan Iklim dan Keberlanjutan Pariwisata: Meningkatnya kesadaran global terhadap pariwisata berkelanjutan menuntut destinasi untuk menerapkan praktik ramah lingkungan.	Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP): Fokus pemerintah pusat pada 10 DPP dan 5 DSP (super prioritas), menuntut daerah lain ikut berbenah untuk menjadi penyangga atau alternatif.	Belum Optimalnya Daya Tarik Wisata Lokal: Masih minimnya infrastruktur, promosi, dan event pariwisata di Pemalang.	Belum optimalnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			ISU Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
- 4 Sub Sektor Ekonomi Kreatif Potensial	Belum dilakukanya fasilitasi akses pasar ekonomi kreatif		Digitalisasi dan Smart Tourism: Tren penggunaan teknologi dalam promosi dan pengelolaan destinasi (AR/VR, big data, IoT).	Peningkatan SDM Pariwisata: Fokus pada sertifikasi dan pelatihan pelaku industri pariwisata.	Minimnya kolaborasi antar-kabupaten: Potensi pariwisata lintas wilayah seperti jalur Pantura belum diintegrasikan.	
			Pasca-Pandemi COVID-19: Perubahan pola wisatawan ke arah pariwisata alam dan wellness tourism.	Kebijakan Satu Data Pariwisata: Penguatan data statistik pariwisata daerah untuk perencanaan dan promosi.	Kurangnya branding destinasi Pemalang: Perlu penguatan citra dan daya tarik destinasi unik lokal (seperti wisata alam, budaya lokal, kuliner).	
	Belum optimal pelestarian cagar budaya	Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah	Kebudayaan	Ketimpangan antar wilayah Jawa dan luar Jawa masih tinggi	Kualitas hidup dan daya saing sumberdaya manusia	Belum optimalnya pemajuan kebudayaan

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Jangka Menengah Disparbud Kabupaten Pemalang

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Disparbud Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Meningkatnya kontribusi pariwisata dan nilai-nilai kebudayaan dalam Pembangunan daerah, dengan indikator :

1. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Pemajuan Kebudayaan

3.2 Sasaran Jangka Menengah Disparbud Kabupaten Pemalang

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kunjungan wisatawan dan pelaku ekonomi kreatif, dengan indikator : 1. Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan 2. Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif potensial di Kabupaten Pemalang
2. Meningkatnya kualitas pemajuan dan kelestarian kebudayaan, dengan indikator : Persentase cagar budaya (CB) dan warisan budaya tak benda (WBTB) yang dilestarikan
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Nilai SAKIP

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Disparbud Kabupaten Pemalang
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Kondisi Akhir Renstra	Strategi	Kebijakan	Program
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Bertumpu Pada Potensi Ekonomi Lokal	Meningkatnya kontribusi pariwisata dan nilai-nilai kebudayaan dalam Pembangunan daerah		1. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Total Realisasi PAD Sektor Pariwisata (Pajak dan Retribusi) / Total Realisasi PAD dikali 100%	%	1,39	1,45	1,50	1,56	1,62	1,68	1,76	1,80			

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Kondisi Akhir Renstra	Strategi	Kebijakan	Program
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing			2. Pemajuan Kebudayaan	upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan yang tersusun dalam Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Rencana Strategis Kebudayaan Nasional. Pemajuan Kebudayaan digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kemajuan pembangunan	Angka	70	70	70	70	70	70	70	70		1.	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Kondisi Akhir Renstra	Strategi	Kebijakan	Program
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
				kebudayaan, menjadi basis dalam formulasi kebijakan dalam ekosistem kebudayaan, dan menjadi acuan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan melalui 10 Objek pemajuan Kebudayaan (manuskrip, bahasa, tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, olahraga tradisional, permainan rakyat, seni) dan Cagar Budaya											

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Kondisi Akhir Renstra	Strategi	Kebijakan	Program
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		Meningkatnya kunjungan wisatawan dan pelaku ekonomi kreatif	1. Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan tahun n - jumlah kunjungan wisatawan tahun n-1 dibagi jumlah kunjungan wisatawan tahun n-1 dikali 100	%	0,78	0,86	0,94	1,02	1,09	1,16	1,23	1,29	Meningkatkan kualitas pariwisata dengan pengembangan destinasi wisata, peningkatan promosi pariwisata, peningkatan SDM pariwisata, pemanfaatan teknologi, penguatan regulasi dan kebijakan.	Peningkatan pariwisata dan ekraf difokuskan pada pengembangan SDM, pemanfaatan teknologi dan promosi serta penguatan regulasi.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Kondisi Akhir Renstra	Strategi	Kebijakan	Program
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
			2. Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif potensial di Kabupaten Pemalang	Jumlah pelaku ekonomi kreatif di Kab. Pemalang tahun n - Jumlah pelaku ekonomi kreatif di Kab. Pemalang tahun n-1 dibagi Jumlah pelaku ekonomi kreatif di Kab. Pemalang tahun n-1 dikali 100	%	0	4,24	8,13	11,28	13,51	14,88	15,54	15,70	Meningkatkan pembinaan ekraf melalui penguatan ekosistem ekraf, pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM, Diversivikasi produk ekraf, peningkatan akses permodalan, promosi dan pemasaran produk ekraf, pemanfaatan teknologi dan penguatan regulasi dan kebijakan.		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Kondisi Akhir Renstra	Strategi	Kebijakan	Program
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		Meningkatnya kualitas pemajuan dan pelestarian kebudayaan	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	Jumlah Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan dibagi Jumlah Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang tercatat DIKALI 100%	%	17.59	21,76	22,81	23,98	24,43	25,47	26,63	26,63	Meningkatnya pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda di Kabupaten Pemalang	1. Registrasi Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ada, 2. Menetapkan Prioritas Pelestarian CB dan WBTB sesuai alokasi anggaran 3. Sosialisasi CB dan WBTB 4. kepada Masyarakat umum	1. Program Pengembangan kebudayaan 2. Program pengembangan kesenian tradisional 3. Program pembinaan Sejarah 4. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya 5. Program pengelolaan permuseuman

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Kondisi Akhir Renstra	Strategi	Kebijakan	Program
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85,06	86	86,50	87	88	89	89,50	89,75	Optimalisasi layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi sebagai upaya untuk mempercepat, mempermudah, dan memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan..		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Kondisi Akhir Renstra	Strategi	Kebijakan	Program
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
			2. Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP	Angka	66,22	70,31	70,35	70,40	70,50	71	71,50	72	Menyusun perencanaan kinerja yang jelas melalui Renstra dan Renja, memprioritaskan kegiatan yang berdampak tinggi, serta menyelaraskan anggaran dengan target yang ingin dicapai, menetapkan indikator kinerja yang SMART, memantau capaian secara rutin, dan memanfaatkan sistem e-SAKIP untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas pelaporan. selain itu, melaksanakan pengendalian internal yang	Mengintegrasikan SAKIP dengan SPIP dan e-planning untuk menjamin konsistensi data dan proses. Selain itu, melaksanakan evaluasi kebijakan dan prosedur secara berkala berdasarkan hasil evaluasi untuk memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Kondisi Akhir Renstra	Strategi	Kebijakan	Program
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
														kuat, melakukan audit dan evaluasi mandiri secara berkala, serta meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan menunjuk pegawai khusus untuk mengawal pelaksanaan SAKIP.		

https://jdih.pemalangkab.go.id

3.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Disparbud Kabupaten Pemalang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka untuk mencapai Tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan oleh Disparpbud Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pariwisata dengan pengembangan destinasi wisata, peningkatan promosi pariwisata, peningkatan SDM pariwisata, pemanfaatan teknologi, penguatan regulasi dan kebijakan.
2. Meningkatkan pembinaan ekraf melalui penguatan ekosistem ekraf, pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM, Diversivikasi produk ekraf, peningkatan akses permodalan, promosi dan pemasaran produk ekraf, pemanfaatan teknologi dan penguatan regulasi dan kebijakan.
3. Meningkatnya pelestarian Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di Kabupaten Pemalang

Kebijakan sebagai langkah strategis dalam menentukan arah program yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam beraktivitas. Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh Disparbud Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pariwisata dan ekraf difokuskan pada pengembangan SDM, pemanfaatan teknologi dan promosi serta penguatan regulasi.
2. Registrasi Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ada
3. Menetapkan Prioritas Pelestarian Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) sesuai alokasi anggaran

Selaras dengan strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang tercantum pada dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 maka Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.2.
Penahapan Tahapan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Penguatan Fondasi Pariwisata Budaya, Edukasi, dan Agrowisata Berbasis Kearifan Lokal	Pengembangan Pariwisata Terpadu dan Revitalisasi Kesenian Tradisional	Modernisasi Destinasi Wisata dan Digitalisasi Layanan Kebudayaan	Peningkatan Daya Saing Pariwisata dan Kebudayaan Menuju Pemalang Bercahaya	Transformasi Ekosistem Pariwisata dan Kebudayaan Menuju Pemalang Mulya yang Maju dan Berkelanjutan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pembangunan daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan membutuhkan perencanaan strategis yang selaras antara visi pemerintah daerah dan kebijakan sektoral perangkat daerah. Dalam konteks ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Pemalang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2026–2030.

Sebagai perangkat daerah yang membidangi sektor kepariwisataan dan kebudayaan, Disparbud menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang berorientasi pada pengembangan pariwisata berkelanjutan dan pelestarian nilai budaya lokal. Tema-tema tahapan pembangunan disusun secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Disparbud secara sistematis, terarah, dan terukur. Berikut penjabaran tahapan RENSTRA Disparbud Kabupaten Pemalang Tahun 2026–2030:

1. TAHAP I – Tahun 2026
   - RPJMD:

     Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia
   - RENSTRA:

     Penguatan Fondasi Pariwisata Budaya, Edukasi, dan Agrowisata Berbasis Kearifan Lokal
   - Arah dan Langkah Teknis Disparbud:
     - Pemetaan potensi wisata budaya, sejarah, kuliner, dan agrowisata desa.
     - Inventarisasi dan dokumentasi warisan budaya tak benda
     - Edukasi sadar wisata dan budaya kepada masyarakat.
     - Peningkatan kapasitas sanggar seni dan pelaku budaya.
     - Kolaborasi dengan sekolah dan komunitas untuk pendidikan budaya lokal.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2. TAHAP II – Tahun 2027
   - RPJMD:

     Mengembangkan potensi perekonomian melalui pengembangan pariwisata terintegrasi, industri bidang pertanian dan perikanan serta pengembangan UMKM
   - RENSTRA:

     Pengembangan Pariwisata Terpadu dan Revitalisasi Kesenian Tradisional
   - Arah dan Langkah Teknis Disparbud:
     - Pembentukan kawasan pariwisata terpadu dengan rute tematik (alam, budaya, religi, kuliner).
     - Revitalisasi kesenian tradisional melalui festival daerah (Sintren, Campursari, Tari Tradisional, Wayang).
     - Pendampingan UMKM budaya (kerajinan, kuliner khas, batik, kriya).
     - Penyelenggaraan festival tahunan budaya Pemalang.
     - Promosi digital destinasi wisata dan seni budaya.

3. TAHAP III – Tahun 2028
   - RPJMD:

     Mempercepat pembangunan perkotaan dan perdesaan guna mendorong pertumbuhan melalui hilirisasi dan moderenisasi
   - RENSTRA:

     Modernisasi Destinasi Wisata dan Digitalisasi Layanan Kebudayaan
   - Arah dan Langkah Teknis Disparbud:
     - Modernisasi fasilitas destinasi wisata (aksesibilitas, kenyamanan, sarana pendukung).
     - Digitalisasi promosi dan layanan budaya melalui aplikasi/web.
     - Pembangunan Desa Wisata Budaya Mandiri berbasis digital.
     - Penguatan peran komunitas seni dalam ekosistem ekonomi kreatif.

https://jdih.pemalangkab.go.id

4. TAHAP IV – Tahun 2029
   - RPJMD:

     Mewujudkan daya saing daerah menuju Pemalang Bersih, Cakap, Handal, dan Mulya (Bercahaya)
   - RENSTRA:

     Peningkatan Daya Saing Pariwisata dan Kebudayaan Menuju Pemalang Bercahaya
   - Arah dan Langkah Teknis Disparbud:
     - Sertifikasi kompetensi SDM pariwisata dan pelaku seni budaya.
     - Pengembangan destinasi unggulan berbasis budaya dan ramah lingkungan.
     - Festival budaya skala nasional untuk promosi Pemalang.
     - Apresiasi pelaku seni, budayawan, dan desa wisata budaya inovatif.
     - Kolaborasi lintas sektor (pendidikan, ekonomi kreatif, komunitas).

5. TAHAP V – Tahun 2030
   - RPJMD:

     Terwujudnya pondasi transformasi menuju akselerasi transformasi untuk mencapai Pemalang Mulya
   - RENSTRA:

     Transformasi Ekosistem Pariwisata dan Kebudayaan Menuju Pemalang Mulya yang Maju dan Berkelanjutan
   - Arah dan Langkah Teknis Disparbud:
     - Pengembangan ekosistem pariwisata dan budaya berbasis data, inovasi, dan kolaborasi multipihak.
     - Pusat kreativitas budaya terpadu (Creative & Heritage Center).
     - Kemitraan dengan akademisi, komunitas, dan sektor swasta dalam pelestarian budaya dan pengembangan destinasi.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program merupakan penjabaran dari kebijakan Disparbud Kabupaten Pemalang dalam bentuk upaya terstruktur yang terdiri atas satu atau lebih kegiatan, yang dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia guna mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi dinas. Kegiatan Disparbud adalah serangkaian aktivitas pembangunan di bidang pariwisata dan kebudayaan yang dirancang untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka pencapaian hasil (outcome) suatu program secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Rumusan kebijakan yang tepat dan kontekstual akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai persoalan pembangunan sektor pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Pemalang dalam lima tahun ke depan. Setiap program disusun berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Disparbud yang kemudian diturunkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator kinerja yang jelas.

Program Disparbud Kabupaten Pemalang berisi program-program prioritas yang disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. Dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan, Disparbud menetapkan pagu indikatif sebagai bentuk estimasi kebutuhan pendanaan yang menjadi batas maksimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Program prioritas yang telah ditetapkan dan dilengkapi dengan pagu indikatif menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Disparbud Kabupaten Pemalang. Program-program prioritas ini merupakan instrumen kebijakan yang akan mendapatkan prioritas dalam pendanaan, dengan tujuan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata serta pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kebudayaandi Kabupaten Pemalang.

Seluruh rangkaian perencanaan pembangunan sektoral Disparbud akan bermuara pada pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang selanjutnya harus dijabarkan secara teknis dan terukur oleh masing-

https://jdih.pemalangkab.go.id

masing bidang di lingkungan dinas. Oleh karena itu, penyusunan program prioritas dalam dokumen RPJMD dan Renstra harus dilakukan dengan cermat dan sesuai kebutuhan daerah, karena menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya.

Pagu indikatif menjadi batas maksimal rencana belanja yang dituangkan dalam APBD. Selanjutnya, pagu dialokasikan ke masing-masing program prioritas sesuai urusan dan target indikator yang telah ditetapkan, serta dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan selama periode lima tahun. Program yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 terbagi dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang. Kerangka perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah sebagaimana alur pada gambar berikut :

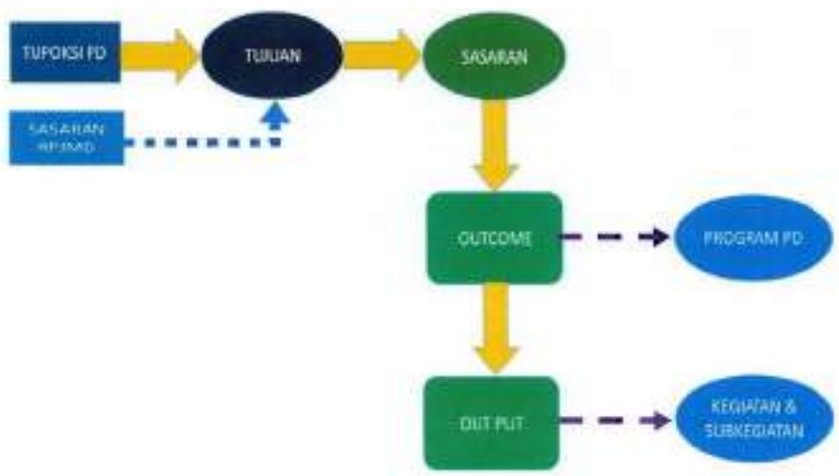

Gambar IV.1.
Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

Adapun program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Disparbud Kabupaten Pemalang antara lain sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang merupakan rangkaian upaya yang berfungsi mendukung kelancaran pelaksanaan seluruh kegiatan dan kebijakan teknis dinas. Program ini tidak secara langsung memberikan layanan publik dalam bidang pariwisata dan kebudayaan namun sangat penting sebagai fondasi administratif, kelembagaan, dan operasional bagi tercapainya tujuan strategis pembangunan daerah.

   Melalui program ini, Disparbud Pemalang melaksanakan perencanaan dan penganggaran secara sistematis. Kegiatan perencanaan meliputi penyusunan dokumen strategis seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), laporan capaian kinerja, hingga laporan evaluasi pembangunan tahunan. Seluruh proses ini dilakukan untuk menjamin adanya arah yang jelas dalam pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya.

   Di bidang administrasi, Disparbud menyelenggarakan pengelolaan tata usaha, kepegawaian, dan arsip perkantoran. Penataan pegawai, pengembangan kapasitas SDM, serta kelengkapan data administrasi rutin menjadi bagian penting dalam menjaga kinerja kelembagaan tetap optimal. Proses surat-menyurat, dokumentasi kegiatan, serta dukungan kegiatan koordinasi internal dan eksternal pun menjadi bagian dari kerja harian yang terintegrasi.

   Selain itu, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah juga menjadi bagian dari program ini. Disparbud bertanggung jawab menyusun dan melaksanakan anggaran sesuai ketentuan, melakukan pencatatan dan pelaporan penggunaan anggaran, serta mengelola aset dinas seperti sarana dan prasarana penunjang pariwisata dan kebudayaan secara tertib dan berkelanjutan.

   Tidak kalah penting, program ini juga mendukung kegiatan operasional rutin seperti pemeliharaan kantor dan kendaraan dinas, layanan kebersihan dan keamanan kantor, penyediaan sarana kerja, serta dukungan logistik pelaksanaan kegiatan baik di dalam maupun

https://jdih.pemalangkab.go.id

luar daerah. Penguatan sistem informasi dinas juga masuk dalam bagian program ini untuk menunjang transformasi digital dalam pengelolaan data dan pelayanan.

Dengan adanya program penunjang ini, seluruh kegiatan utama Disparbud Kabupaten Pemalang dapat berjalan secara terorganisir, efisien, dan terarah. Program ini menjadi fondasi yang menopang kelangsungan pelayanan pembangunan di sektor pariwisata dan kebudayaan menuju Pemalang yang bercahaya.

2. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata merupakan salah satu program strategis yang dilaksanakan oleh Disparbud Kabupaten Pemalang dalam rangka memperkuat sektor pariwisata sebagai penggerak perekonomian daerah. Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas objek dan daya tarik wisata milik pemerintah daerah agar lebih menarik, kompetitif, dan mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.

Kegiatan dalam program ini mencakup penataan kawasan destinasi wisata agar lebih representatif, aman, dan ramah pengunjung, termasuk peningkatan fasilitas umum seperti toilet, jalur akses, tempat istirahat, papan informasi, area parkir, dan fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, dilakukan juga penyediaan dan pengembangan atraksi wisata baru yang berbasis potensi lokal, termasuk atraksi budaya, alam, dan buatan, guna memperkaya pengalaman wisata dan memperpanjang masa tinggal pengunjung.

Disparbud juga mendorong kolaborasi dengan pelaku usaha pariwisata dan masyarakat sekitar destinasi untuk menciptakan paket wisata yang terintegrasi dan berbasis pemberdayaan masyarakat. Hal ini mencakup pelatihan pelaku wisata, penguatan kelompok sadar wisata (Pokdarwis), serta fasilitasi pelaku ekonomi kreatif agar terlibat aktif dalam mendukung ekosistem pariwisata di daerah.

Program ini dijalankan dengan pendekatan berkelanjutan, sehingga tidak hanya fokus pada aspek fisik destinasi, tetapi juga mencakup pelestarian lingkungan, peningkatan kapasitas SDM pariwisata, dan digitalisasi informasi wisata. Daya tarik destinasi wisata yang terus ditingkatkan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan,

https://jdih.pemalangkab.go.id

lama tinggal, belanja wisata, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat lokal.

3. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

Program Pemasaran Pariwisata merupakan upaya strategis Disparbud Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan citra dan daya saing destinasi wisata daerah melalui promosi yang terarah, kreatif, dan berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk memperluas jangkauan informasi wisata, menarik minat wisatawan nusantara maupun mancanegara, serta memperkuat posisi Pemalang sebagai salah satu tujuan wisata unggulan di Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan dalam program ini mencakup penyusunan materi promosi seperti kalender event pariwisata, video promosi, brosur, katalog digital, serta pengelolaan media sosial dan website pariwisata daerah secara aktif dan informatif. Selain itu, dilakukan pengembangan dan digitalisasi informasi destinasi wisata agar mudah diakses oleh wisatawan melalui platform daring, termasuk kerja sama dengan media dan influencer wisata untuk memperluas jangkauan publikasi.

Kegiatan lainnya adalah partisipasi dalam pameran dan bursa pariwisata tingkat regional dan nasional, baik secara mandiri maupun berkolaborasi dengan pelaku usaha pariwisata dan komunitas lokal. Disparbud juga menyelenggarakan event promosi seperti famtrip, festival budaya, pertunjukan seni, dan kampanye digital kreatif guna menarik wisatawan dan meningkatkan eksposur destinasi wisata.

Upaya pemasaran ini juga mencakup penguatan kemitraan dengan sektor swasta, agen perjalanan, asosiasi pariwisata, dan pemerintah daerah lain dalam rangka membangun jejaring promosi yang luas dan berkelanjutan. Dengan program ini, diharapkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Pemalang meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja di sektor pariwisata.

4. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dilaksanakan oleh Disparbud Kabupaten Pemalang bertujuan untuk memperkuat

https://jdih.pemalangkab.go.id

sektor ekonomi kreatif sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus memberikan perlindungan hukum atas karya dan produk kreatif masyarakat. Program ini menjadi instrumen penting dalam mendukung pelaku ekonomi kreatif agar lebih berdaya saing, inovatif, dan terlindungi secara legal.

Dalam pelaksanaannya, program ini mencakup kegiatan pembinaan dan fasilitasi pelaku ekonomi kreatif yang bergerak di berbagai subsektor seperti kuliner, kriya, fesyen, seni pertunjukan, fotografi, musik, serta konten digital. Disparbud memberikan dukungan berupa pelatihan keterampilan, peningkatan kualitas produk, pengemasan, dan pemasaran, termasuk pemanfaatan platform digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Selain penguatan kapasitas produksi, fokus utama program ini juga diarahkan pada fasilitasi pendaftaran dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, seperti merek dagang, hak cipta, paten, dan desain industri. Upaya ini dilakukan melalui pendampingan teknis, sosialisasi pentingnya HKI bagi keberlangsungan usaha kreatif, serta kerja sama dengan instansi terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM, dinas koperasi/UMKM, dan kantor wilayah.

Program ini juga mendukung penyelenggaraan event dan expo ekonomi kreatif yang menampilkan produk-produk unggulan lokal, sebagai sarana promosi, jejaring bisnis, dan edukasi publik. Dengan adanya perlindungan HKI yang kuat dan pemanfaatan potensi ekonomi kreatif secara maksimal, diharapkan pelaku usaha kreatif di Kabupaten Pemalang mampu bersaing secara sehat dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja baru.

5. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan oleh Disparbud Kabupaten Pemalang merupakan bagian dari strategi pembangunan pariwisata dan penguatan sektor ekonomi kreatif yang berorientasi pada peningkatan kapasitas pelaku, profesionalisme, dan daya saing sumber daya manusia (SDM) di kedua sektor tersebut. Tujuan utama dari program ini adalah menciptakan SDM yang kompeten, kreatif,

https://jdih.pemalangkab.go.id

dan adaptif terhadap dinamika industri, teknologi, serta kebutuhan pasar global.

Melalui program ini, Disparbud menyelenggarakan berbagai kegiatan pengembangan kapasitas SDM pariwisata, seperti pelatihan pemandu wisata (tour guide), pelatihan manajemen homestay, pelatihan pelayanan prima (hospitality), serta pelatihan digitalisasi promosi wisata. Kegiatan ini ditujukan kepada para pelaku wisata, pengelola destinasi, masyarakat sekitar objek wisata, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), serta pelaku UMKM yang mendukung industri pariwisata.

Di sisi ekonomi kreatif, dilakukan fasilitasi pelatihan keterampilan usaha kreatif, pelatihan desain dan kemasan produk, manajemen usaha, serta pemanfaatan teknologi informasi dan media digital untuk mendukung pemasaran dan produksi. Pelaku ekonomi kreatif juga didorong untuk memahami pentingnya inovasi dan hak kekayaan intelektual dalam menjaga orisinalitas dan keberlanjutan usahanya.

Program ini juga melibatkan kerja sama dengan lembaga pelatihan, akademisi, komunitas kreatif, pelaku industri, dan lembaga sertifikasi profesi untuk memastikan bahwa output dari kegiatan pelatihan dan pengembangan benar-benar berdampak terhadap peningkatan kualitas dan profesionalisme pelaku wisata serta pelaku ekonomi kreatif.

Dengan pengembangan SDM yang komprehensif dan terarah, diharapkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Pemalang dapat tumbuh lebih cepat, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, serta mendukung visi daerah dalam mewujudkan Pemalang yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.

6. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Program Pengembangan Kebudayaan dilaksanakan melalui kegiatan pelestarian kesenian tradisional, perlindungan cagar budaya, serta pengembangan adat istiadat, tradisi, bahasa, dan sastra daerah sebagai upaya pelestarian identitas budaya lokal. Selain itu, difasilitasi pula penetapan Warisan Budaya Takbenda, penguatan kelembagaan dan sumber daya kebudayaan, serta pemanfaatan budaya dalam pendidikan dan pariwisata. Program ini juga diarahkan pada

https://jdih.pemalangkab.go.id

peningkatan apresiasi dan literasi budaya masyarakat melalui festival, pameran, serta pemanfaatan teknologi digital untuk dokumentasi dan promosi kebudayaan sehingga nilai-nilai budaya dapat terus dilestarikan, dikembangkan, dan diwariskan bagi generasi mendatang.

7. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

   Program Pengembangan Kesenian Tradisional dilaksanakan melalui kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian serta meningkatkan eksistensi kesenian daerah. Kegiatan yang dilakukan meliputi fasilitasi dan pembinaan sanggar seni, kelompok kesenian, dan pelaku seni tradisional; penyelenggaraan festival, lomba, serta pagelaran kesenian; pendokumentasian dan digitalisasi karya seni tradisi; serta penguatan kapasitas seniman dan komunitas budaya agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Program ini juga diarahkan untuk memperluas apresiasi masyarakat terhadap kesenian daerah, memperkuat identitas budaya lokal, serta menjadikan kesenian tradisional sebagai potensi yang dapat mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah.

8. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH

   Program Pembinaan Sejarah dilaksanakan sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran, pemahaman, serta apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah bangsa dan daerah. Kegiatan yang dilakukan antara lain berupa pendokumentasian, penelitian, dan publikasi sejarah lokal; pengembangan bahan ajar serta media edukasi sejarah untuk sekolah dan masyarakat; penyelenggaraan seminar, diskusi, maupun pameran sejarah; serta fasilitasi dan pembinaan komunitas sejarah, pegiat sejarah, dan generasi muda. Program ini juga diarahkan pada pelestarian peninggalan sejarah, peningkatan literasi sejarah, serta penguatan identitas dan jati diri bangsa melalui pewarisan nilai-nilai perjuangan kepada generasi mendatang.

9. PROGRAM PELSTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

   Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dilaksanakan untuk melindungi, melestarikan, serta memanfaatkan warisan budaya berupa benda, bangunan, situs, struktur, dan kawasan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Kegiatan yang dilakukan

https://jdih.pemalangkab.go.id

antara lain inventarisasi, registrasi, dan penetapan cagar budaya; konservasi, rehabilitasi, dan revitalisasi objek cagar budaya; pengelolaan kawasan bersejarah sebagai ruang publik edukatif; serta penyelenggaraan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pelestarian cagar budaya. Program ini juga diarahkan untuk memperkuat identitas daerah, meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap nilai sejarah, sekaligus menjadikan cagar budaya sebagai potensi daya tarik wisata budaya yang berkelanjutan.

10. PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

Program Pengelolaan Permuseuman dilaksanakan sebagai upaya untuk mengembangkan fungsi museum sebagai pusat pelestarian, edukasi, penelitian, dan rekreasi budaya. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengelolaan koleksi museum melalui inventarisasi, konservasi, dan digitalisasi; penyusunan tata pamer yang menarik dan edukatif; penyelenggaraan pameran tetap maupun temporer; serta pengembangan program edukasi museum bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Selain itu, dilakukan pula peningkatan kapasitas pengelola museum, kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pemanfaatan koleksi, serta promosi museum sebagai destinasi wisata budaya. Program ini diarahkan untuk memperkuat peran museum sebagai ruang pembelajaran publik, menjaga warisan budaya daerah, serta meningkatkan minat dan apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan kebudayaan.

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.1
Tabel Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Bertumpu Pada Potensi Ekonomi Lokal	**Meningkatnya kontribusi pariwisata dan nilai-nilai kebudayaan dalam Pembangunan daerah**				**Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**		
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing					**Pemajuan Kebudayaan**		
		Meningkatnya kunjungan wisatawan dan pelaku ekonomi kreatif	**Meningkatnya kuantitas wisatawan.**	**Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara**	**Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	
				Jumlah sarana prasarana daya tarik wisata yang ditingkatkan kualitasnya		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	
				Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
				Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
				Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
				Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Jumlah kawasan strategis pariwisata yang dikelola dan ditata		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	
				Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Jumlah fasilitas umum dan amenitas yang dibangun/ditingkatkan di destinasi pariwisata		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	
				Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan		Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota		Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya		Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Jumlah usaha pariwisata yang ditetapkan memiliki TDUP		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	
				Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi		Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota	
				Jumlah usaha yang dibina dan diawasi		Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota	
				Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021		Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota	
				Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota		Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	
				Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi		Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	
				Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha		Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	
				Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota		Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	
				Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)		Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	
				Jumlah rencana induk pariwisata yang ditetapkan		**Penetapan rencana induk pariwisata di Kabupaten/Kota**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwiataan di Kabupaten/Kota		Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kunjungan promosi pariwisata	**Jumlah pengunjung media promosi online dan offline**		**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	
				Jumlah materi promosi pariwisata yang diproduksi dan disebarluaskan		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	
				Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	
				Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
				Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
		Meningkatnya kunjungan wisatawan dan pelaku ekonomi kreatif	**Meningkatnya perlindungan HKI terhadap pelaku ekonomi kreatif**	**Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapat pendampingan pendaftarkan HAKI**	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif potensial di Kabupaten Pemalang	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	
				Jumlah prasarana ruang kreatif/zona kreatif/kota kreatif yang dibangun atau difungsikan		**Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota**	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia		Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terdata dan terverifikasi		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	
				Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan		Pengembangan Pendidikan	
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif		Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	
				Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia		Penyediaan Infrastruktur	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif		Pengembangan Sistem Pemasaran	
				Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif		Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	
				Jumlah Insentif yang Diberikan		Fasilitasi pemberian insentif	
				Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah		Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	
				Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan bantuan pemerintah		Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)	
				Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual		Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual		Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual	
				Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah		Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	
				Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif		Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	
				Tersedianya skema insentif ekonomi kreatif		Penyusunan Skema Insentif Daerah	
				Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah		Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
				Jumlah Peraturan Daerah Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif		Perlindungan Hasil Kreativitas	
				Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi		Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif			
			Meningkatnya pembinaan terhadap pelaku ekraf	**Presentase pelaku ekraf yang dibina/dilatih ketrampilan**		**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	
				Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	
				Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
				Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI		Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	
				Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata		Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
				Persentase pelaku ekonomi kreatif yang mengalami peningkatan kapasitas setelah pelatihan		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	
				Jumlah Laporan Hasil Dukungan FasilitasiMenghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha		Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	
				Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal		Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Subsektor Ekonomi Kreatif	
				Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan		Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif		Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif		Pelatihan Asesor Kompetensi/WorkplaceAssesor(WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	
				Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	
				Jumlah pelatihan atau workshop pengembangan kapasitas yang dilaksanakan		**Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	
				Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaanbagi OAPDalamBidang PariwisatadanEkonomi KreatifBagi OAP Yang Dilaksanakan		Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		Meningkatnya kualitas pemajuan dan pelestarian kebudayaan	**Meningkatnya kualitas pengembangan kebudayaan**	**Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan**	**Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan**	**Program Pengembangan Kebudayaan**	
				Jumlah kegiatan pengelolaan kebudayaan di daerah		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	
				Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Perlindungan,Pengembangan,Pemanfaatan		Perlindungan Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
				Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata kebudayaan	
				Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan		Penyusunan, Pemuktakhiran Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina		Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan	
				Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina		Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan	
				Jumlah kegiatan pelestarian kesenian tradisional di daerah		**Pelastarian Kesenian Tradisonal yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Perlindungan,Pengembangan dan Pemanfaatan		Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
				Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	
				Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Pengahargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan		Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkotribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	
				Jumlah kegiatan pembinaan lembaga adat di daerah		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	
				Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		Perlindungan Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	
				Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	
				Jumlah kegiatan pengelolaan kebudayaan		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota yang Disediakan dan Dipelihara		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota	
				Jumlah Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota yang Tersedia		Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Tersedia		Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Jumlah kegiatan pengelolaan kebudayaan		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Di Kabupaten/Kota Disediakan dan Dipelihara		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota	
				Jumlah Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota yang Tersedia		Penyusunan, Pemutakhiran, Pokok Pikiran Penetapan Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Jumlah Dokumen Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Tersedia		Integrasi Dokumen PPKD Kedalam Perencanaan Daerah Dokumen naan Pembangunan	
				Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan		**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	
				Jumlah kegiatan pembinaan kesenian di daerah		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal Mengikuti Proses yang Standarisasi		Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai Kebutuhan dan Tuntutan	
				Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	
				Persentase sejarah lokal yang dibina		**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	
				Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal			
				Jumlah kegiatan pembinaan sejarah lokal di Daerah		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	
				Jumlah Manusia Sumber Daya dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan		Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	
				Jumlah Sarana Prasarana Pembinaan Sejarah		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	
				Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat		Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	
				Persentase cagar budaya yang teregistrasi		**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	
				Presentase warisan budaya yang ditetapkan			
				Jumlah kegiatan penetapan cagar budaya di Daerah		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	
				Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	
				Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan		Penetapan Cagar Budaya	
				Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan		Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	
				Jumlah kegiatan pengelolaan cagar budaya		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi		Pelindungan Cagar Budaya	
				Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan		Pengembangan Cagar Budaya	
				Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan		Pemanfaatan Cagar Budaya	
				Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi		Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	
				Jumlah kegiatan penerbitan isin membawa kegiatan cagar budaya ke luar daerah		**Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota**	
				Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah 1 Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi		Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah kegiatan penetapan cagar budaya di Daerah		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	
				Jumlah Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten/Kota Tingkat		Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten/Kota Tingkat	
				Jumlah Cagar Budaya Peringkat di Kabupaten/Kota yang Ditetapakan		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Kabupaten/Kota	
				Jumlah kegiatan pelestarian kesenian tradisional di daerah		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	
				Jumlah Cagar Budaya yang Didataftarkan Kedalam Register Nasional Cagar Budaya		Pendaftaran Cagar Budaya Kedalam Register Nasional Cagar Budaya	
				Jumlah warisan Budaya Dunia yang di Miliki atau di Kuasai Pemerintah Daerah yang Kabupaten/Kota Dikelola		Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang di Miliki atau di Kuasai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah kegiatan penetapan sistem zonasi		**Penetapan Sistem Zonasi**	
				Jumlah Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang Diterribkan		Penerbitan Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
				Jumlah Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten/Kota		Penetapan Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				yang Ditetapkan		Kabupaten/Kota	
				Jumlah kegiatan penetapan cagar budaya di Daerah		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	
				Jumlah Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten/Kota		Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten/Kota Tingkat	
				Jumlah Cagar Budaya Peringkat di Kabupaten/Kota yang Ditetapakan		Penetapan cagar budaya peringkat provinsi Kabupaten/Kota	
				Jumlah kegiatan pelestarian kesenian tradisional di daerah		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	
				Jumlah Cagar Budaya yang Didaftarkan Kedalam Register Nasional Cagar Budaya		Pendaftaran Cagar Budaya Kedalam Register Nasional Cagar Budaya	
				Jumlah Warisan Budaya Dunia yang di Miliki atau di Kuasai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Dikelola		Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang di Miliki atau di Kuasai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah kegiatan penetapan sistem zonasi		**Penetapan Sistem Zonasi**	
				Jumlah Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang Ditertibkan		Penerbitan Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Peringkat Cagar Budaya Kabupaten/Kota	
				Jumlah Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten/Kota yang Ditetapkan		Penetapan Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Budaya di Cagar Kabupaten/Kota	
				Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan		**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	
				Jumlah sarana dan prasarana museum daerah yang tersedia dan terpelihara			
				Jumlah kegiatan pengelolaan museum di daerah		**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	
				Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu		Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Secara Terpadu Koleksi	
				Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya		Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	
				Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum		Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	
				Jumlah Sarana dan Prasana Museum yang Tersedia dan Terpelihara		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Terlaksananya Prasarana Museum	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi		Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola		Pengelolaan Koleksi Museum	
				Jumlah Layanan Operasional Museum		Pengelolaan Operasional Museum	
				Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum		Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum	
				Jumlah penyediaan dan dan pemeliharaan sarana prasarana Taman Budaya		Penyediaan dan Pemeliharaan Terlaksananya penyediaan Sarana dan Prasarana Taman dan pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Budaya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Direvitalisasi		Revitalisasi Taman Budaya	
				Jumlah Operasional Taman Budaya		Pengolahan Operasional Taman Budaya	
				Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Taman Budaya		Penglibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Taman Budaya	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai regulasi**	**Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
				Persentase capaian layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi	**Nilai SAKIP**		
				Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun		Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu		Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	
				Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan		Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
				Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun		Koordinasi dan Penyusunan Laporan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Persentase Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
				Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Penyediaan Bahan/Material	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan		Pengadaan Alat Besar	
				Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan		Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Pengadaan Mebel	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
				Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		Pengadaan Aset Tak Berwujud	
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
						Lapangan	
				Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara		Pemeliharaan Mebel	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
				Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi		Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.2
Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemalang
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						**1,215,728,000**		**997,335,140**		**997,335,140**		**997,335,140**		**997,335,140**		**997,335,140**	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	**Meningkatnya kuantitas wisatawan**	**Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara**	**Orang**	**1,159,242**	**1,180,242**	**909,227,000**	**1,192,242**	**810,450,540**	**1,205,242**	**810,450,540**	**1,219,242**	**810,450,540**	**1,220,242**	**810,450,540**	**1,220,242**	**810,450,540**	
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Daerah**	**Jumlah sarana prasarana daya tarik wisata yang ditingkatkan kualitasnya**	**Unit (fasilitas)**	**-**	**1**	**50,000,000**	**2**	**5,000,000**	**3**	**5,000,000**	**4**	**5,000,000**	**5**	**5,000,000**	**5**	**5,000,000**	
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	-	1	10,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Lokasi	-	1	10,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Laporan	-	1	10,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	Orang	-	10	10,000,000	10	1,000,000	10	1,000,000	10	1,000,000	10	1,000,000	10	100,000,000	
Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	1	10,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten**	**Jumlah kawasan strategis pariwisata yang dikelola dan ditata**	**Kawasan**	**-**	**2**	**60,000,000**	**2**	**141,223,540**	**2**	**141,223,540**	**2**	**141,223,540**	**2**	**141,223,540**	**2**	**141,223,540**	
Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	-	1	10,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	-	1	10,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit	-	1	10,000,000	1	136,223,540	1	136,223,540	1	136,223,540	1	136,223,540	1	136,223,540	
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Lokasi	-	1	10,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Orang	-	10	10,000,000	10	1,000,000	10	1,000,000	10	1,000,000	10	1,000,000	10	1,000,000	
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	Laporan	-	1	10,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Kabupaten	Kabupaten/Kota															
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten**	**Jumlah fasilitas umum dan amenitas yang dibangun/ditingkatkan di destinasi pariwisata**	**Unit**	**-**	**2**	**699,227,000**	**3**	**654,227,000**	**4**	**654,227,000**	**5**	**654,227,000**	**6**	**654,227,000**	**7**	**654,227,000**	
Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Lokasi	-	1	10,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	-	1	10,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	-	4	158,728,000	1	158,728,000	1	158,728,000	1	158,728,000	1	158,728,000	1	158,728,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	-	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	12	1	380,499,000	1	380,499,000	1	380,499,000	1	380,499,000	1	380,499,000	1	380,499,000	
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Lokasi	8	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	
Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota	Dokumen	-	1	10,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	Terlaksananya Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	Dokumen	-	1	10,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	-	1	10,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten**	**Jumlah usaha pariwisata yang ditetapkan memiliki TDUP**	**Usaha**	**-**	**10**	**90,000,000**	**15**	**9,000,000**	**20**	**9,000,000**	**25**	**9,000,000**	**30**	**9,000,000**	**35**	**9,000,000**	
Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota	Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab	Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	Usaha Pariwisata	-	1	10,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	Usaha	-	1	10,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	Dokumen	-	1	10,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	Terlaksananya Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	Usaha	-	1	10,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	Laporan	-	1	10,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Laporan	-	1	10,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Terlaksananya Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	Unit Usaha	-	1	10,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan perijinan berusaha berbasis risiko dan standar usaha pariwisata	Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	Pelaku Usaha	-	1	10,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Pelaksanaan Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah	Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang di Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Usahanya	Badan Usaha	-	1	10,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Penetapan rencana induk pariwisata di Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Penetapan rencana induk pariwisata di Kabupaten**	**Jumlah rencana induk pariwisata yang ditetapkan**	**dokumen**	**-**	**1**	**10,000,000**	**-**	**1,000,000**	**-**	**1,000,000**	**-**	**1,000,000**	**-**	**1,000,000**	**-**	**1,000,000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwiataan di Kabupaten/Kota	Dokumen	-	1	10,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	**Meningkatnya kunjungan promosi pariwisata**	**Jumlah pengunjung media promosi online dan offline**	**Orang**	**21,372**	**23,604**	**10,000,000**	**24,356**	**24,000,000**	**25,183**	**24,000,000**	**26,069**	**24,000,000**	**26,150**	**24,000,000**	**-**	**24,000,000**	
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten**	**Jumlah materi promosi pariwisata yang diproduksi dan disebarluaskan**	**Unit (Media)**	**3**	**3**	**10,000,000**	**3**	**24,000,000**	**3**	**24,000,000**	**3**	**24,000,000**	**3**	**24,000,000**	**3**	**24,000,000**	
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Tersedianya Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	-	1	1,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Promosi	-	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	**Meningkatnya perlindungan HKI terhadap pelaku ekonomi kreatif**	**Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapat pendampingan pendaftarkan HAKI**	**%**	**40**	**50**	**10,000,000**	**50**	**62,000,000**	**60**	**62,000,000**	**60**	**62,000,000**	**70**	**62,000,000**	**70**	**62,000,000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah**	**Jumlah prasarana ruang kreatif/zona kreatif/kota kreatif yang dibangun atau difungsikan**	**Unit**	**-**	**1**	**1,000,000**	**1**	**53,000,000**	**1**	**53,000,000**	**1**	**53,000,000**	**1**	**53,000,000**	**1**	**53,000,000**	
Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Terlaksananya Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Unit	-	1	1,000,000	1	53,000,000	1	53,000,000	1	53,000,000	1	53,000,000	1	53,000,000	
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	**Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terdata dan terverifikasi**	**Orang/ Unit Usaha**	**-**	**133**	**9,000,000**	**148**	**9,000,000**	**168**	**9,000,000**	**193**	**9,000,000**	**223**	**9,000,000**	**258**	**9,000,000**	
Pengembangan Pendidikan	Terlaksananya Pengembangan Pendidikan	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Terlaksananya Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Laporan	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Penyediaan Infrastruktur	Terlaksananya Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia	Unit	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengembangan Sistem Pemasaran	Terlaksananya Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dokumen	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Fasilitasi pemberian insentif	Terlaksananya Fasilitasi pemberian insentif	Jumlah Insentif yang Diberikan	Pelaku Usaha	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Lembaga	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Terlaksananya Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	Kegiatan	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual	Terlaksananya Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual	Dokumen	-	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Dokumen	-	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	
Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	Promosi	-	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	
Penyusunan Skema Insentif Daerah	Terlaksananya Penyusunan Skema Insentif Daerah	Tersedianya skema insentif ekonomi kreatif	Dokumen	-	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	
Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Terlaksananya Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	Kebijakan	-	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Laporan	-	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Terlaksananya Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Produk	-	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	
Penilaian Mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia (PMK3I)	Ditetapkannya subsektor unggulan daerah melalui dokumen Berita Acara Hasil Uji Petik (BAHUP) yang disepakati oleh stakeholder	Jumlah dokumen Berita Acara Hasil Uji Petik (BAHUP)	Dokumen	-	1	300,000	1	300,000	1	300,000	1	300,000	1	300,000	1	300,000	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**Meningkatnya pembinaan terhadap pelaku ekraf**	**Presentase pelaku ekraf yang dibina/dilatih ketrampilan**	**%**	**63**	**25**	**286,501,000**	**31**	**100,884,600**	**33**	**100,884,600**	**38**	**100,884,600**	**42**	**100,884,600**	**-**	**100,884,600**	
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi**	**Orang**	**-**	**5**	**95,901,005**	**6**	**100,884,593**	**7**	**100,884,593**	**8**	**100,884,593**	**9**	**100,884,593**	**10**	**100,884,593**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	280	300	95,901,000	310	100,884,588	320	100,884,588	330	100,884,588	340	100,884,588	350	100,884,588	
Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Orang	-	5	1	10	1	15	1	20	1	25	1	30	1	
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang	-	5	1	10	1	15	1	20	1	25	1	30	1	
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	-	5	1	10	1	15	1	20	1	25	1	30	1	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan	4	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	**Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif di daerah**	**Kegiatan**	**-**	**1**	**190,599,995**	**2**	**7**	**3**	**7**	**3**	**7**	**4**	**7**	**4**	**7**	
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	200	200	90,000,000	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	
Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Terlaksananya Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan FasilitasiMenghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Laporan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Subsektor Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal	Lembaga	-	1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	5	1	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/ Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/ Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	Orang	-	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	
Pelatihan Asesor Kompetensi/WorkplaceAssesor(WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan Asesor Kompetensi/WorkplaceAssesor(WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Work place Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Orang	-	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Orang	-	10	100,599,991	10	2	10	2	10	2	10	2	10	2	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				**-**	**-**	**4,715,500,000**	**-**	**3,314,811,862**	**-**	**3,324,811,850**	**-**	**4,324,811,850**	**-**	**4,324,811,850**	**-**	**-**	
Program Pengembangan Kebudayaan	**Meningkatnya kualitas pengembangan kebudayaan**	**Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan**	**%**	**19,4**	**28,36**	**1,821,455,000**	**31,34**	**1,511,530,440**	**34,33**	**1,511,530,440**	**37,31**	**1,511,530,440**	**38,8**	**1,511,530,440**	**-**	**-**	
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya pengelolaan kebudayaan di daerah**	**Jumlah kegiatan pengelolaan kebudayaan di daerah**	**Kegiatan**	**-**	**2**	**1,413,455,000**	**2**	**1,103,530,440**	**2**	**1,103,530,440**	**2**	**1,103,530,440**	**2**	**1,103,530,440**	**-**	**-**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Perlindungan Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Perlindungan,Pengembangun,pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Perlindungan,Pengembangan,Pemanfaatan	Objek	-	1	1,230,758,000	1	920,530,440	1	920,530,440	1	920,530,440	1	920,530,440	-	-	
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata kebudayaan	Terlaksananya Pembianaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	240	20	179,697,000	20	180,000,000	20	180,000,000	20	180,000,000	20	180,000,000	-	-	
Penyusunan, Pemuktakhiran Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan, Pemuktakiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	Dokumen	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	-	-	
Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan	Terlaksanaanya pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang kebudayaan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina	Orang	-	10	1,000,000	10	1,000,000	10	1,000,000	10	1,000,000	10	1,000,000	-	-	
Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina	Lembaga	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	-	-	
Pelastarian Kesenian Tradisonal yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya pelestarian kesenian tradisonal**	**Jumlah kegiatan pelestarian kesenian tradisional di daerah**	**Kegiatan**	**-**	**2**	**402,000,000**	**2**	**402,000,000**	**2**	**402,000,000**	**2**	**402,000,000**	**2**	**402,000,000**	**-**	**-**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya Perlindungan,Pengembangun,pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Perlindungan,Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	1.070.788	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	-	-	
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Laporan	430	4	400,000,000	4	400,000,000	4	400,000,000	4	400,000,000	4	400,000,000	-	-	
Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkotribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Tersedianya penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Pengahargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Sertifikat	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	-	-	
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya pembinaan lembaga adat di daerah**	**Jumlah kegiatan pembinaan lembaga adat di daerah**	**kegiatan**	**-**	**1**	**6,000,000**	**1**	**6,000,000**	**1**	**6,000,000**	**1**	**6,000,000**	**1**	**6,000,000**	**-**	**-**	
Perlindungan Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Terlaksananya Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuaan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	-	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	-	-	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Orang	-	10	1,000,000	10	1,000,000	10	1,000,000	10	1,000,000	10	1,000,000	-	-	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	Unit	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	-	-	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	**Meningkatnya kualitas pengembangan kesenian tradisional**	**Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan**	**%**	**-**	**100**	**20,000,000**	**100**	**50,000,000**	**100**	**50,000,000**	**100**	**50,000,000**	**100**	**50,000,000**	**-**	**-**	
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya pembinaan kesenian di daerah**	**Jumlah kegiatan pembinaan kesenian di daerah**	**Kegiatan**	**-**	**1**	**20,000,000**	**1**	**50,000,000**	**1**	**50,000,000**	**1**	**50,000,000**	**1**	**50,000,000**	**-**	**-**	
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	-	10	18,000,000	10	48,000,000	10	48,000,000	10	48,000,000	10	48,000,000	-	-	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai Kebutuhan dan Tuntutan	Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal Mengikuti Proses yang Standarisasi	Sertifikat	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	-	-	
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Lembaga Tradisional Kesenian	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	-	-	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	**Meningkatnya pembinaan kualitas sejarah**	**Persentase sejarah lokal yang dibina**	**%**	**-**	**10,53**	**101,907,000**	**10,53**	**48,364,460**	**12,00**	**48,364,460**	**12,00**	**48,364,460**	**12,00**	**48,364,460**	**-**	**-**	
		Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	**Orang**	**-**	**86**	**-**	**86**	**-**	**86**	**-**	**86**	**-**	**86**	**-**	**-**	**-**	
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah**	**Jumlah kegiatan pembinaan sejarah lokal di Daerah**	**Kegiatan**	**-**	**1**	**101,907,000**	**1**	**48,364,460**	**1**	**48,364,460**	**1**	**48,364,460**	**1**	**48,364,460**	**-**	**-**	
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Manusia Sumber Daya dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang	181	200	99,907,000	200	46,364,460	200	46,364,460	200	46,364,460	200	46,364,460	-	-	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana Prasarana Pembinaan Sejarah	Unit	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	-	-	
Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Tersedianya Data Informasi Sejarah Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Dokumen	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	-	-	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	**Meningkatnya kualitas pelestarian dan pengelolaan cagar budaya**	**Persentase cagar budaya yang teregistrasi**	**%**	**-**	**0,80**	**2,762,138,000**	**0,76**	**1,704,916,950**	**0,72**	**1,664,916,950**	**0,67**	**2,664,916,950**	**0,63**	**2,664,916,950**	**-**	**-**	
		Presentase warisan budaya yang ditetapkan	**%**	**-**	**0,07**	**-**	**0,08**	**-**	**0,08**	**-**	**0,09**	**-**	**0,09**	**-**	**-**	**-**	
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**Terlaksanannya penetapan cagar budaya di daerah**	**Jumlah kegiatan penetapan cagar budaya di Daerah**	**Kegiatan**	**-**	**1**	**156,292,988**	**1**	**152,000,000**	**1**	**152,000,000**	**1**	**152,000,000**	**1**	**152,000,000**	**-**	**-**	
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	-	-	
Penetapan Cagar Budaya	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	148	1	154,292,988	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	-	-	
Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Terlaksananya Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	Objek	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	-	-	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**Terlaksananya pengelolaan cagar budaya peringkat di daerah**	**Jumlah kegiatan pengelolaan cagar budaya**	**Kegiatan**	**-**	**1**	**2,603,845,000**	**1**	**1,550,916,938**	**1**	**1,510,916,938**	**1**	**2,510,916,938**	**1**	**2,510,916,938**	**-**	**-**	
Pelindungan Cagar Budaya	Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	3,742,450,000	1	2,600,845,000	1	1,547,916,938	1	1,507,916,938	1	2,507,916,938	1	2,507,916,938	-	-	
Pengembangan Cagar Budaya	Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	-	-	
Pemanfaatan Cagar Budaya	Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	-	-	
Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi	Objek	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	-	-	
Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	**Terlaksananya penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah**	**Jumlah kegiatan penerbitan isin membawa kegiatan cagar budaya ke luar daerah**	**Kegiatan**	**-**	**1**	**2,000,012**	**1**	**2,000,012**	**1**	**2,000,012**	**1**	**2,000,012**	**1**	**2,000,012**	**-**	**-**	
Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah 1 Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terbitnya Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	Objek	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	-	-	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	Laporan	-	1	1,000,012	1	1,000,012	1	1,000,012	1	1,000,012	1	1,000,012	-	-	
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	**Meningkatnya kualitas pengelolaan permuseuman**	**Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan**	%	-	-	**10,000,000**	-	**12**	**50**	**50,000,000**	**100**	**50,000,000**	**150**	**50,000,000**	-	-	
		Jumlah sarana dan prasarana museum daerah yang tersedia dan terpelihara	**Unit**	-	**2**	-	**4**	-	**7**	-	**8**	-	**9**	-	-	-	
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	**Terlaksananya pengelolaan museum di Daerah**	**Jumlah kegiatan pengelolaan museum di daerah**	**Kegiatan**	-	**1**	**10,000,000**	**1**	**12**	**1**	**50,000,000**	**1**	**50,000,000**	**1**	**50,000,000**	-	-	
Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Secara Terpadu Koleksi	Pengembangan, Terlaksananya Pelindungan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Unit	-	1	9,999,989	1	1	1	49,999,989	1	49,999,989	1	49,999,989	-	-	
Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Orang	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	
Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Unit	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Terlaksananya Prasarana Museum	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	
Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Museum Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Unit	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	
Pengelolaan Koleksi Museum	Terlaksananya Pengolahan Koleksi Museum	Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola	Unit	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	
Pengelolaan Operasional Museum	Terlaksananya Pengelolaan Operasional Museum	Jumlah Layanan Operasional Museum	Layanan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	
Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum	Terlibatnya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum	Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum	Orang	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	
Penyediaan dan Pemeliharaan Terlaksananya penyediaan Sarana dan Prasarana Taman dan pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Budaya	Terlaksananya penyediaan dan Pemeliharaan sarana dan Prasana Taman Budaya	Jumlah penyediaan dan dan pemeliharaan sarana prasarana Taman Budaya	Unit	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Revitalisasi Taman Budaya	Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Direvitalisasi	Unit	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	
Pengolahan Operasional Taman Budaya	Terlibatnya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Taman Museum	Jumlah Operasional Taman Budaya	Layanan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	
Penglibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Taman Budaya	Terlibatnya Masyarakat dalam Penyelaggaraan Kegiatan Publik di Taman Budaya	Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Taman Budaya	Orang	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota**	**Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi**	**%**	**100**	**100**	**10,053,405,000**	**100**	**11,310,953,793**	**100**	**11,310,953,793**	**100**	**11,310,953,793**	**100**	**11,310,953,793**	**100**	**11,310,953,793**	
		Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi	**%**	**100**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai regulasi**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi**	**Dokumen**	**35**	**35**	**78,203,000**	**35**	**83,203,000**	**35**	**83,203,000**	**35**	**83,203,000**	**35**	**83,203,000**	**35**	**83,203,000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	2	3,127,000	2	3,127,000	2	3,127,000	2	3,127,000	3	3,127,000	3	3,127,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1,732,500	1	1,732,500	1	1,732,500	1	1,732,500	1	1,732,500	1	1,732,500	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	2	2,825,500	2	2,825,500	2	2,825,500	2	2,825,500	2	2,825,500	2	2,825,500	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1,458,500	1	1,458,500	1	1,458,500	1	1,458,500	1	1,458,500	1	1,458,500	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	2	3,020,000	2	3,020,000	2	3,020,000	2	3,020,000	2	3,020,000	2	3,020,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	SKPD																
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	3,019,500	3	3,019,500	3	3,019,500	3	3,019,500	3	3,019,500	3	3,019,500	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	20,420,000	4	20,420,000	4	20,420,000	4	20,420,000	4	20,420,000	-	20,420,000	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	-	1	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	-	1	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	-	1	42,600,000	1	42,600,000	1	42,600,000	1	42,600,000	2	42,600,000	2	42,600,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen	-	-	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Terlaksananya Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Substansi	-	-	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Terlaksananya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis	Berita Acara	-	-	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		Pembangunan															
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi	Persentase Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi	%	100	100	7,299,231,000	100	7,305,231,000	100	7,305,231,000	100	7,305,231,000	100	7,305,231,000	100	7,305,231,000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	49	48	7,298,171,000	48	7,298,171,000	48	7,298,171,000	48	7,298,171,000	48	7,298,171,000	48	7,298,171,000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	-	1	1,060,000	1	1,060,000	1	1,060,000	1	1,060,000	1	1,060,000	1	1,060,000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	-	-	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	-	-	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	-	-	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	-	-	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	-	-	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	-	-	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai regulasi**	**Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi**	%	100	100	-	100	7,000,000	100	7,000,000	100	7,000,000	100	7,000,000	100	7,000,000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	-	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	-	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	-	-	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	-	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	-	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	-	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	-	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi**	**%**	**100**	**100**	**-**	**100**	**11,000,000**	**100**	**11,000,000**	**100**	**11,000,000**	**100**	**11,000,000**	**100**	**11,000,000**	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	-	-	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	-	-	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	-	-	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-	-	10	1,000,000	10	1,000,000	10	1,000,000	10	1,000,000	10	1,000,000	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	800	-	-	10	1,000,000	10	1,000,000	10	1,000,000	10	1,000,000	10	1,000,000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-	-	10	1,000,000	10	1,000,000	10	1,000,000	10	1,000,000	10	1,000,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Fasilitasi Administrasi umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi**	**Persentase Fasilitasi Administrasi umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi**	**%**	**100**	**100**	**364,353,000**	**100**	**873,901,793**	**100**	**873,901,793**	**100**	**873,901,793**	**100**	**873,901,793**	**100**	**873,901,793**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1,556,250	1	1,556,250	1	1,556,250	1	1,556,250	1	1,556,250	1	1,556,250	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	8,483,500	12	8,483,500	12	8,483,500	12	8,483,500	12	8,483,500	12	8,483,500	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	-	-	12	1,000,000	12	1,000,000	12	1,000,000	12	1,000,000	12	1,000,000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	69,952,250	12	74,501,043	12	74,501,043	12	74,501,043	12	74,501,043	12	74,501,043	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	11,920,000	4	11,920,000	4	11,920,000	4	11,920,000	4	11,920,000	4	11,920,000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	-	-	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	-	-	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	-	1	42,387,000	1	42,387,000	1	42,387,000	1	42,387,000	1	42,387,000	1	42,387,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	60	230,054,000	70	730,054,000	80	730,054,000	90	730,054,000	100	730,054,000	110	730,054,000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	-	-	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	-	-	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**	**%**	**100**	**100**	**-**	**100**	**210,000,000**	**100**	**210,000,000**	**100**	**210,000,000**	**100**	**210,000,000**	**100**	**210,000,000**	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	1,000,000	1	1,000,000	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	1,000,000	1	1,000,000	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	1,000,000	1	1,000,000	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Terlaksananya Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	1,000,000	1	1,000,000	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	60	-	-	1	1,000,000	1	4,000,000	1	5,000,000	1	8,000,000	1	8,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	-	-	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	-	-	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	1,000,000	-	-	1	1,000,000	-	-	-	-	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	1,000,000	-	-	1	1,000,000	-	-	-	-	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	1,000,000	-	-	1	1,000,000	-	-	-	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia**	**%**	**100**	**100**	**2,026,175,000**	**100**	**2,028,175,000**	**100**	**2,028,175,000**	**100**	**2,028,175,000**	**100**	**2,028,175,000**	**100**	**2,028,175,000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	-	-	12	1,000,000	12	1,000,000	12	1,000,000	12	1,000,000	12	1,000,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	683,908,000	12	683,908,000	12	683,908,000	12	683,908,000	12	683,908,000	12	683,908,000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	-	-	12	1,000,000	12	1,000,000	12	1,000,000	12	1,000,000	12	1,000,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	1,342,267,000	12	1,342,267,000	12	1,342,267,000	12	1,342,267,000	12	1,342,267,000	12	1,342,267,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	**%**	**100**	**100**	**285,443,000**	**100**	**792,443,000**	**100**	**792,443,000**	**100**	**792,443,000**	**100**	**794,443,000**	**100**	**792,443,000**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	1	1,000,000	-	-	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30	30	118,630,000	30	118,630,000	30	120,630,000	30	120,630,000	30	120,630,000	30	120,630,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	1	1,000,000	-	-	
Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	-	-	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	1	18,500,000	1	18,500,000	1	18,500,000	1	18,500,000	1	18,500,000	1	18,500,000	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	-	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	-	-	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	-	-	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	148,313,000	1	148,313,000	1	148,313,000	1	148,313,000	1	148,313,000	1	148,313,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	-	-	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang
Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode Renstra	Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	0,86	0,94	1,02	1,09	1,16	1,23	1,29	
2	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif potensial di Kabupaten Pemalang	%	4,24	8,13	11,28	13,51	14,88	15,54	15,70	
3	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	21,76	22,81	23,98	24,43	25,47	26,63	26,63	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,00	86,50	87,00	88,00	89,00	89,50	89,50	
5	Nilai SAKIP OPD	Angka	70,31	70,35	70,40	70,50	71,00	71,50	71,50	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang

No	IKK	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					Kondisi Akhir Renstra
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan mancanegara tahun n - Jumlah wisatawan mancanegara tahun n-1) dibagi Jumlah wisatawan mancanegara tahun n-1 dikali 100%	%	-16,67	90	10	15	20	25	30	32
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	(Jumlah wisatawan nusantara tahun n - Jumlah wisatawan nusantara tahun n-1) dibagi Jumlah wisatawan nusantara tahun n-1 dikali 100%	%	-24,2	0,78	0,86	0,94	1,02	1,09	1,16	1,20
3	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual dibagi Jumlah kamar yang tersedia dikali 100%	%	32,14	34,69	35	35,5	36	36,5	37	37,5
4	Kontribusi sektor pariwisata Lerhadap PDRB harga berlaku	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	5,63	5,78	5,8	5,9	6	6,1	6,2	6,3

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	IKK	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					Kondisi Akhir Renstra
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	1,25	1,39	1,45	1,46	1,49	1,48	1,47	1,47
6	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan dibagi Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan dikali 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.5
Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1,821,097,708	1,948,574,547	2,065,489,014	2,168,763,461	2,255,513,992	2,323,179,401
Hasil Sewa BMD	211,010,978	225,781,747	239,328,651	251,295,083	261,346,885	269,187,291

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB V
P E N U T U P

5.1. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2030, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang yang berlaku.

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan Renstra berjalan efektif dan selaras dengan tujuan yang ditetapkan, dilakukan evaluasi minimal satu kali dalam satu periode perencanaan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai capaian kinerja, mengidentifikasi hambatan, serta menyusun rekomendasi perbaikan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat lebih tepat sasaran. Hasil evaluasi menjadi dasar penting dalam penyesuaian kebijakan strategis dan perencanaan tahun-tahun berikutnya, guna meningkatkan akuntabilitas serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;

https://jdih.pemalangkab.go.id

3. Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pemalang, September 2025
Kepala Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang

DIAN IKA SISWANTI, S.Si.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19750227 199903 2 004

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif baik secara sosial maupun ekonomi. Prinsip dasar pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan pada Perikemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa; Pemberdayaan dan kemandirian bagi setiap orang dan masyarakat; Adil dan merata bagi setiap orang yang mempunyai hak yang sama; serta Pengutamaan upaya dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan pengutamaan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain, ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan melalui promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Selain itu pembangunan kesehatan juga diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara mutu fasilitas kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan secara berkelanjutan dan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kesehatan, termasuk didalamnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pemerintah daerah diberikan kesempatan yang luas dalam merencanakan pembangunan di daerah sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan ini diberikan dalam rangka mengakomodir kebutuhan, karakteristik dan ciri khas yang bersifat kedaerahan untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal demi terwujudnya pembangunan yang mampu memberikan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menjalankan tugasnya, pemerintah daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id

berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sedangkan untuk Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada RPJMD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pemalang, yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dinas kesehatan yang menjalankan urusan wajib bidang kesehatan serta bersifat indikatif. Renstra disusun untuk menjamin keberlangsungan dan konsistensi program dan kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Selain itu renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dalam menyusun Renstra Tahun 2025-2029 mempedomani Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang juga memperhatikan beberapa dokumen perencanaan lain, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang, Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Pemalang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang, Renstra Kementerian Kesehatan RI dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

dokumen perencanaan pembangunan lainnya yang terkait. Keterkaitan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya

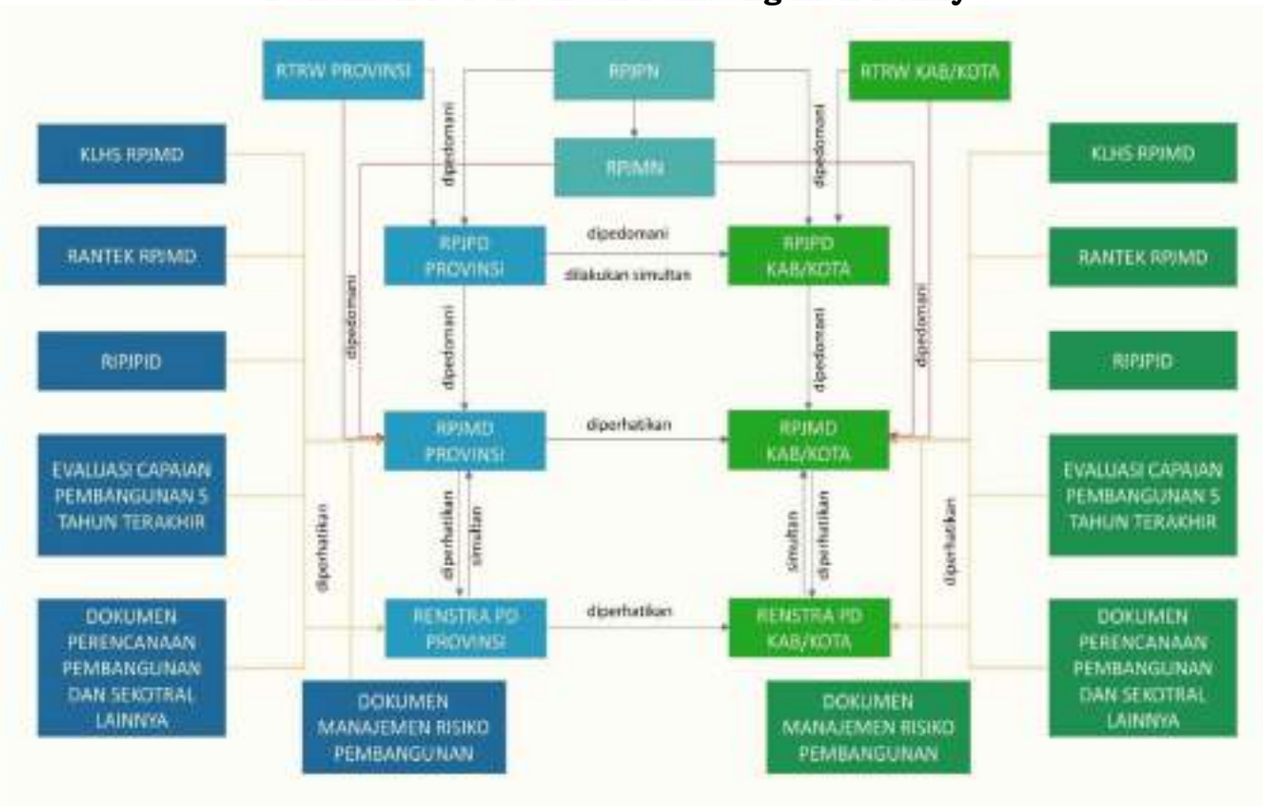

Sumber : Intruksi Menteri Dalam Negaeri No. 2 Tahun 2025

Dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan memberikan pedoman dan arahan yang jelas bagi Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Daerah Kabupaten Pemalang periode tahun 2025-2029. Renstra ini selanjutnya juga dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan sebagai dokumen perencanaan tahunan dan acuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan.

1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

https://jdih.pemalangkab.go.id

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

https://jdih.pemalangkab.go.id

Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ...);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2050 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 9);

https://jdih.pemalangkab.go.id

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang; (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 2);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1313);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20217 Nomor 1419);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

https://jdih.pemalangkab.go.id

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah kebijakan, pedoman dan penjelasan program pembangunan kesehatan lima tahun ke depan bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik pemerintah daerah, masyarakat dan swasta dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama untuk urusan kesehatan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030.

Sedangkan Tujuan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dalam rangka melaksanakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Pemalang;
2. Sebagai dokumen perencanaan bagi unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dalam menentukan prioritas program disertai pagu anggaran dan target indikator kinerja tahun 2025-2029;
3. Sebagai acuan jajaran aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur berikut strategi dan arah kebijakan rentang tahun 2025-2029;
4. Sebagai pedoman pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi capaian kinerja pembangunan kesehatan periode tahun 2025-2029.

https://jdih.pemalangkab.go.id

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 mengacu pada sistematika penulisan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada latar belakang memuat secara ringkas latar belakang yang mendasari penyusunan rencana strategis dinas kesehatan, mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan rencana strategis, menguraikan maksud dan tujuan dari penyusunan rencana startegis dan menjelaskan sistematika penulisan tentang uraian ringkas masing- masing bab dalam rencana strategis.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang tugas, fungsi dan susunan organisasi dinas kesehatan dalam penyelenggaraan urusan kesehatan, mengulas secara ringkas sumber daya dinas kesehatan, capaian kinerja dinas kesehatan periode sebelumnya, berikut kelompok sasaran dalam pelayanan dinas kesehatan termasuk mitra yang turut serta dalam pemberian pelayanan. Selain itu juga mengidentifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan dinas kesehatan, dan mengidentifikasi isu-isu strategis sesuai lingkungan dinamis yang dapat mempengaruhi dinas kesehatan.

Bab III Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Kabupaten Pemalang yang kemudian diuraikan ke dalam tujuan dan sasaran rencana strategis dinas kesehatan tahun 2025-2029. Pada bab ini juga memuat strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dinas kesehatan lima tahun mendatang.

Bab IV Program, Kegiatan , Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcame dan output. Daftar program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja dinas kesehatan harus selaras

https://jdih.pemalangkab.go.id

sebagai upaya menjaga kesinambungan perencanaan dinas kesehatan hingga tahun 2030.

Selain itu juga memuat penentuan target keberhasilan dinas kesehatan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran renstra melalui indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci dinas kesehatan.

Bab V Penutup

Memuat kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi rencana strategis dinas kesehatan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang pada Bab III Bagian Ketiga Pasal 7 disebutkan bahwa Dinas Kesehatan (Dinkes) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pada Lampiran II halaman 62 pada Peraturan Bupati tersebut juga menyebutkan bahwa Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud diatas, hubungan perangkat daerah Provinsi dan Dinas Daerah bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Adapun sinkronisasi sebagaimana dimaksud meliputi; sinkronisasi data, sinkronisasi sasaran dan program, dan sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan. Selain itu Dinas Daerah dapat melaksanakan urusan pemerintahan dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan tata kerja sebagaimana tersebut diatas, Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1) Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;

https://jdih.pemalangkab.go.id

3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang terdiri dari :

1) Kepala Dinas;
2) Sekretariat, terdiri dari :
   a) Subbagian Keuangan, dan
   b) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3) Bidang Kesehatan Masyarakat;
4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
5) Bidang Pelayanan Kesehatan;
6) Bidang Sumber Daya Kesehatan;
7) Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD) ;
8) Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK);
9) Unit Organisasi Bersifat Fungsional (UOBF); dan
10) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1 Susunan Organisasi
Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang

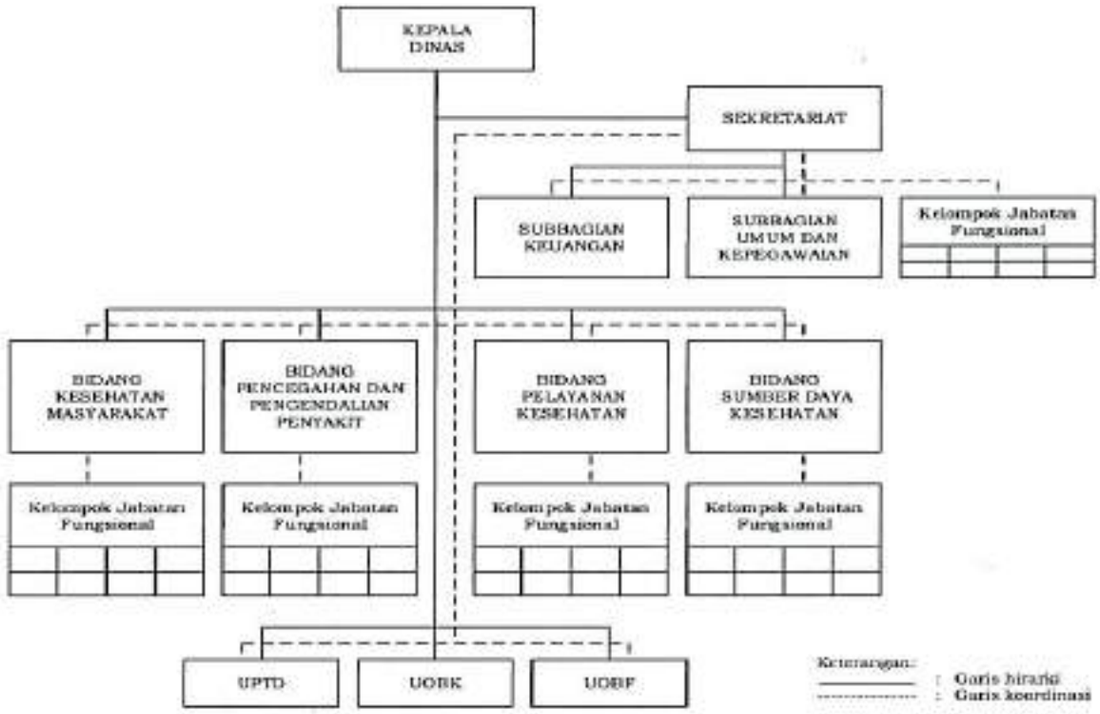

Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023

https://jdih.pemalangkab.go.id

Uraian tugas sesuai jabatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang lebih rinci diuraikan pada Lampiran II Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 pada halaman 62 sampai dengan 68.

Pada Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang pada Bab VI Pasal 46 disebutkan juga bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Pada urusan pemerintahan bidang kesehatan, selain UPTD, terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) serta Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Organisasi Bersifat Fungsional (UOBF), yang memberikan layanan secara profesional.

Pada saat ini Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang yang dimaksud adalah Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Pemalang. Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang di Bab II Pasal 2 disebutkan Labkesda Kelas A pada Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pada bagian Lampiran I Peraturan tersebut terpampang gambar susunan organisasi Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang sebagai berikut.

Gambar 2.2 Susunan Organisasi
Laboratorium Kesehatan Daerah
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang yang dimaksud merupakan Rumah Sakit Daerah ini memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian. Pada Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Kelas C pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang di Bab III Pasal 2 disebutkan RSUD dr. M. Ashari merupakan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada bagian Lampiran I Perbup tersebut terpampang gambar bagan susunan organisasi RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang sebagai berikut.

Gambar 2.3 Susunan Organisasi
Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang

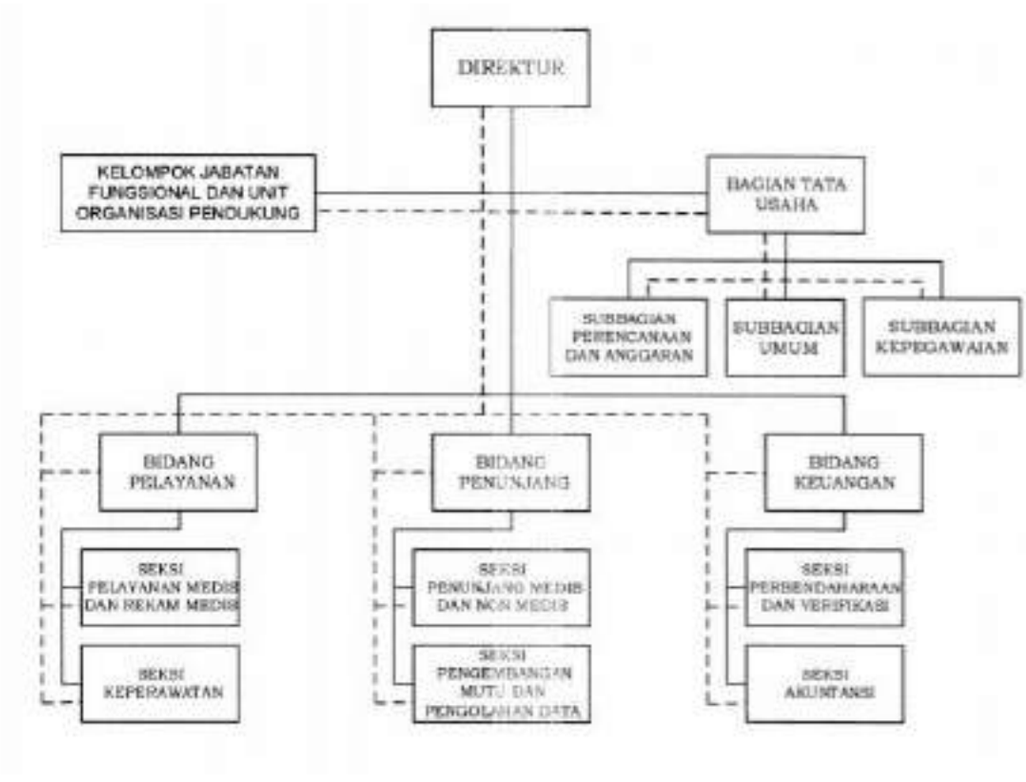

Untuk Unit Organisasi Bersifat Fungsional (UOBF) yang dimaksud pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, di Bab II Bagian Kedua Pasal 4 disebutkan Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional. Puskesmas

https://jdih.pemalangkab.go.id

dipimpin oleh Kepala Puskesmas, yang dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun susunan organisasi puskesmas adalah sebagai berikut.

Gambar 2.4 Susunan Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat

Saat ini jumlah Puskesmas di Kabupaten Pemalang sebanyak 25 Puskesmas yang terdiri dari:

1) Puskesmas Banyumudal;
2) Puskesmas Warungpring;
3) Puskesmas Pulosari;
4) Puskesmas Belik;
5) Puskesmas Watukumpul;
6) Puskesmas Cikadu;
7) Puskesmas Kebandaran;
8) Puskesmas Jatiroyom;
9) Puskesmas Bantarbolang;
10) Puskesmas Randudongkal;
11) Puskesmas Kalimas;
12) Puskesmas Paduraksa;
13) Puskesmas Mulyoharjo;
14) Puskesmas Kebondalem;
15) Puskesmas Banjardawa;
16) Puskesmas Kabunan;
17) Puskesmas Jebed;

https://jdih.pemalangkab.go.id

18) Puskesmas Petarukan;
19) Puskesmas Karangasem;
20) Puskesmas Klareyan;
21) Puskesmas Losari;
22) Puskesmas Purwoharjo;
23) Puskesmas Sarwodadi;
24) Puskesmas Rowosari;
25) Puskesmas Mojo.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk penyelenggaraan upaya kesehatan sesuai dengan pola dan manajemen upaya kesehatan dibutuhkan sumber daya yang memadai. Upaya kesehatan dapat berdayaguna dan berhasilguna bila kebutuhan sumber daya tenaga, biaya dan sarana kesehatan terpenuhi.

2.1.2.1 Komposisi Pegawai Perangkat Daerah

Komposisi pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang termasuk unit kerjanya per 31 Desember 2024 menurut jabatannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai menurut Jabatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2024

No	Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Jenis Jabatan												Total ASN
		JPT		Adminis-trator		Pengawas		Fungsional				Pelaksana		
								PNS		PPPK				
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Dinas Kesehatan	0	1	3	2	0	2	8	5	0	0	14	28	63
2	Labkesda Kab. Pemalang	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	3	8
3	RSUD dr. M. Ashari	0	0	1	3	5	4	76	200	31	57	57	44	478
4	Puskesmas Banyumudal	0	0	0	0	0	0	4	23	2	5	2	0	36
5	Puskesmas Warungpring	0	0	0	0	0	0	8	14	0	6	1	1	30
6	Puskesmas Pulosari	0	0	0	0	0	0	4	28	0	6	2	1	41
7	Puskesmas Belik	0	0	0	0	0	0	6	27	1	10	2	1	47
8	Puskesmas Watukumpul	0	0	0	0	0	0	3	24	3	7	3	1	41
9	Puskesmas Cikadu	0	0	0	0	0	0	7	17	0	4	0	0	28
10	Puskesmas Kebandaran	0	0	0	0	0	0	5	21	2	6	1	1	36
11	Puskesmas Jatiroyom	0	0	0	0	0	0	2	19	0	7	1	0	29
12	Puskesmas Bantarbolang	0	0	0	0	0	0	4	37	0	5	2	1	49
13	Puskesmas Randudongkal	0	0	0	0	0	0	9	42	4	7	1	1	64
14	Puskesmas Kalimas	0	0	0	0	0	0	3	21	3	4	1	0	32
15	Puskesmas Paduraksa	0	0	0	0	0	0	4	23	1	6	2	2	38

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Jenis Jabatan												Total ASN
		JPT		Adminis-trator		Pengawas		Fungsional				Pelaksana		
								PNS		PPPK				
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
16	Puskesmas Mulyoharjo	0	0	0	0	0	0	8	24	1	6	2	0	41
17	Puskesmas Kebondalem	0	0	0	0	0	0	4	26	1	5	2	1	39
18	Puskesmas Banjardawa	0	0	0	0	0	0	7	21	2	4	2	0	36
19	Puskesmas Kabunan	0	0	0	0	0	0	7	22	1	4	1	1	36
20	Puskesmas Jebed	0	0	0	0	0	0	5	23	0	7	4	3	42
21	Puskesmas Petarukan	0	0	0	0	0	0	9	22	3	5	4	2	45
22	Puskesmas Karangasem	0	0	0	0	0	0	4	22	0	4	0	3	33
23	Puskesmas Klareyan	0	0	0	0	0	0	4	27	0	5	1	2	39
24	Puskesmas Losari	0	0	0	0	0	0	5	33	1	5	3	1	48
25	Puskesmas Purwoharjo	0	0	0	0	0	0	8	36	1	8	4	2	59
26	Puskesmas Sarwodadi	0	0	0	0	0	0	3	20	4	3	1	1	32
27	Puskesmas Rowosari	0	0	0	0	0	0	6	20	0	6	2	0	34
28	Puskesmas Mojo	0	0	0	0	0	0	3	24	0	5	1	3	36
	Jumlah	**0**	**1**	**4**	**5**	**6**	**7**	**216**	**821**	**62**	**198**	**117**	**103**	**1540**

Sumber : ASN di Lingkungan Pemerintah Kab. Pemalang Dalam Angka Tahun 2024

Komposisi pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2024 menurut golongan sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai menurut Golongan
Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2024

No	Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Golongan														Total ASN
		PNS								PPPK						
		I/c-d		II/a-d		III/a-d		IV/a-d		VII		IX		X		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Dinas Kesehatan	0	0	5	2	13	27	8	8	0	0	0	0	0	0	63
2	Labkesda Kab. Pemalang	0	0	0	0	2	4	0	0	1	1	0	0	0	0	8
3	RSUD dr. M. Ashari	2	0	40	26	80	180	19	43	31	55	0	0	0	2	478
4	Puskesmas Banyumudal	0	0	0	2	4	20	1	2	1	5	1	0	0	0	36
5	Puskesmas Warungpring	0	0	0	2	7	12	1	2	0	5	0	1	0	0	30
6	Puskesmas Pulosari	0	0	1	0	4	28	1	1	0	5	0	1	0	0	41
7	Puskesmas Belik	0	0	2	1	6	26	0	1	1	9	0	1	0	0	47
8	Puskesmas Watukumpul	0	0	3	3	3	21	1	0	3	6	0	1	0	0	41
9	Puskesmas Cikadu	0	0	2	5	5	11	0	1	0	3	0	0	0	1	28
10	Puskesmas Kebandaran	0	0	1	1	5	21	0	0	1	6	1	0	0	0	36
11	Puskesmas Jatiroyom	0	0	2	7	1	11	0	1	7	0	0	0	0	0	29

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Golongan														Total ASN
		PNS								PPPK						
		I/c-d		II/a-d		III/a-d		IV/a-d		VII		IX		X		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
12	Puskesmas Bantarbolang	0	0	2	2	3	35	1	1	0	3	0	2	0	0	49
13	Puskesmas Randudongkal	0	0	2	0	5	40	3	3	4	6	0	0	0	1	64
14	Puskesmas Kalimas	0	0	0	1	4	15	0	3	2	6	1	0	0	0	32
15	Puskesmas Paduraksa	1	0	0	0	4	22	1	3	1	6	0	0	0	0	38
16	Puskesmas Mulyoharjo	0	0	2	1	5	19	2	5	1	6	0	0	0	0	41
17	Puskesmas Kebondalem	0	0	2	1	4	22	0	4	1	4	0	1	0	0	39
18	Puskesmas Banjardawa	0	0	1	1	8	17	0	3	2	4	0	0	0	0	36
19	Puskesmas Kabunan	0	0	0	2	7	19	1	2	1	4	0	0	0	0	36
20	Puskesmas Jebed	0	0	2	1	5	25	1	1	0	7	0	0	0	0	42
21	Puskesmas Petarukan	0	0	2	1	8	22	1	3	3	5	0	0	0	0	45
22	Puskesmas Karangasem	0	0	1	7	3	17	0	1	0	3	0	0	0	1	33
23	Puskesmas Klareyan	0	0	1	2	3	23	1	4	0	4	0	1	0	0	39
24	Puskesmas Losari	0	0	2	1	6	31	1	1	0	3	0	2	1	0	48
25	Puskesmas Purwoharjo	1	0	1	0	6	37	3	2	1	6	0	1	0	1	59
26	Puskesmas Sarwodadi	0	0	0	2	4	17	0	2	4	3	0	0	0	0	32
27	Puskesmas Rowosari	0	0	1	0	6	19	2	0	0	6	0	0	0	0	34
28	Puskesmas Mojo	0	0	1	1	2	25	1	1	0	5	0	0	0	0	36
	Jumlah	**4**	**0**	**76**	**72**	**213**	**766**	**49**	**98**	**65**	**176**	**3**	**11**	**1**	**6**	**1540**

Sumber : ASN di Lingkungan Pemerintah Kab. Pemalang Dalam Angka Tahun 2024

Komposisi pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2024 menurut tingkat pendidikan sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2024

No	Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Tingkat Pendidikan																Jumlah ASN
		SD		SMP		SMA/ K		D1		D3		D4		S1		S2		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Dinas Kesehatan	0	0	0	0	8	3	0	0	2	2	0	5	8	22	7	6	63
2	Labkesda Kab. Pemalang	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	0	0	0	1	0	1	8
3	RSUD dr. M. Ashari	3	0	10	0	39	33	0	0	49	124	3	10	43	127	23	14	478
4	Puskesmas Banyumudal	0	0	0	0	1	0	0	0	3	21	0	0	4	7	0	0	36
5	Puskesmas Warungpring	0	0	1	0	0	0	0	1	3	15	0	1	5	4	0	0	30
6	Puskesmas Pulosari	0	0	0	0	2	1	0	0	2	18	0	2	2	14	0	0	41
7	Puskesmas Belik	0	0	0	0	3	0	0	1	2	26	0	3	4	8	0	0	47

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Tingkat Pendidikan																Jumlah ASN
		SD		SMP		SMA/ K		D1		D3		D4		S1		S2		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
8	Puskesmas Watukumpul	0	0	0	0	3	1	0	0	3	18	0	1	3	12	0	0	41
9	Puskesmas Cikadu	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	0	5	3	6	0	0	28
10	Puskesmas Kebandaran	0	0	0	0	1	1	0	1	3	16	0	2	4	8	0	0	36
11	Puskesmas Jatiroyom	0	0	0	0	1	0	0	0	1	21	0	1	1	4	0	0	29
12	Puskesmas Bantarbolang	0	0	0	0	2	1	0	0	3	23	0	4	1	15	0	0	49
13	Puskesmas Randudongkal	0	0	0	0	2	1	0	0	8	25	0	1	3	22	1	1	64
14	Puskesmas Kalimas	0	0	0	0	1	0	0	0	3	17	0	0	3	7	0	1	32
15	Puskesmas Paduraksa	0	0	1	0	1	1	0	0	2	16	0	0	3	12	0	2	38
16	Puskesmas Mulyoharjo	0	0	1	0	1	0	0	0	4	15	0	3	4	11	1	1	41
17	Puskesmas Kebondalem	0	0	2	0	1	1	0	0	1	16	0	1	3	13	0	1	39
18	Puskesmas Banjardawa	0	0	0	0	2	0	0	0	3	11	0	3	5	10	1	1	36
19	Puskesmas Kabunan	0	0	0	0	1	1	0	0	4	15	0	1	4	9	0	1	36
20	Puskesmas Jebed	0	0	0	0	4	2	0	0	1	25	0	1	4	4	0	1	42
21	Puskesmas Petarukan	0	0	0	0	2	2	0	0	5	17	0	1	9	9	0	0	45
22	Puskesmas Karangasem	0	0	0	0	0	3	0	1	1	12	0	3	3	10	0	0	33
23	Puskesmas Klareyan	0	0	0	0	2	1	0	1	1	19	0	0	2	12	0	1	39
24	Puskesmas Losari	0	0	0	0	3	1	0	0	1	23	0	2	5	13	0	0	48
25	Puskesmas Purwoharjo	1	0	0	0	3	1	0	1	4	31	0	2	5	11	0	0	59
26	Puskesmas Sarwodadi	0	0	0	0	1	1	0		6	14	0	2	1	6	0	1	32
27	Puskesmas Rowosari	0	0	1	0	0	0	0	0	2	21	0	0	5	5	0	0	34
28	Puskesmas Mojo	0	0	0	0	1	2	0	1	0	21	0	0	3	7	0	1	36
	Jumlah	**4**	**0**	**16**	**0**	**85**	**58**	**0**	**7**	**124**	**594**	**3**	**54**	**140**	**389**	**33**	**33**	**1540**

Sumber : ASN di Lingkungan Pemerintah Kab. Pemalang Dalam Angka Tahun 2024

Jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan pada PD Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2024 menurut jenis ketenagaan, termasuk didalamnya Dokter Tamu, Tenaga BLUD dan Tenaga Kontrak.

Tabel 2.4 Jumlah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2024

No	Jenis Ketenagaan	Jumlah Tenaga								Jumlah
		Dinkes		Labkesda		RSUD		Puskesmas		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	**Tenaga Medis**									
1	Dokter Spesialis	0	0	0	0	19	11	0	0	30
2	Dokter Umum	0	0	0	0	6	8	22	44	80
3	Dokter Gigi	0	0	0	0	1	1	5	17	24

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Jenis Ketenagaan	Jumlah Tenaga								Jumlah
		Dinkes		Labkesda		RSUD		Puskesmas		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
B	**Tenaga Kesehatan**									
1	Perawat	0	0	0	1	80	201	114	156	552
2	Bidan	0	0	0	0	0	88	0	644	732
3	Apoteker	0	0	0	0	3	8	5	23	39
4	Tenaga Teknis Kefarmasian	0	0	0	0	3	13	3	9	28
5	Tenaga Gizi	0	0	0	0	7	1	6	35	49
6	Tenaga Kesehatan Masyarakat	0	0	0	0	0	1	11	42	54
7	Tenaga Kesehatan Lingkungan	0	0	0	0	2	9	10	17	38
8	Tenaga Keterapian Fisik	0	0	0	0	3	10	1	0	14
9	Tenaga Keteknisian Medis	0	0	0	0	8	17	8	24	57
10	Tenaga Biomedika	0	0	0	0	11	8	0	1	20
11	Tenaga Laboratorium Medis	0	0	1	0	9	22	10	33	75
12	Psikologi Klinis	0	0	0	0	0	2	0	0	2
C	**Tenaga Penunjang**									
1	Pejabat Struktural	3	8	1	1	7	7	0	0	27
2	Tenaga Penunjang Managemen	42	70	3	5	245	83	128	107	683
	Jumlah	**45**	**78**	**5**	**7**	**404**	**490**	**323**	**1152**	**2504**

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2024

2.1.2.2 Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan merupakan salah satu bagian pokok yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan bidang kesehatan dalam rangka upaya meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Jumlah keberadaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Pemalang sampai dengan akhir Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5 Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2024

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
(1)	*(2)*	*(3)*
1	Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang	1 Unit
2	Rumah Sakit Umum Daerah	1 Unit
3	Rumah Sakit Umum Swasta	8 Unit
4	Puskesmas Rawat Inap	7 Unit
5	Puskesmas Non Rawat Inap	18 Unit
6	Puskesmas Pembantu	63 Unit

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
(1)	*(2)*	*(3)*
7	Puskesmas Keliling Roda 4	70 Unit
8	Laboratorium Kesehatan Daerah	1 Unit
9	Laboratorium Kesehatan Swasta	3 Unit
10	Gudang Obat/ Instalasi Farmasi	1 Unit
11	Klinik Pratama	34 Unit
12	Klinik Utama	2 Unit
13	Tempat Praktik Mandiri Dokter	107 Unit
14	Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi	18 Unit
15	Tempat Praktik Mandiri Dokter Spesialis	4 Unit
16	Tempat Praktik Mandiri Bidan	39 Unit
17	Tempat Praktik Mandiri Perawat	7 Unit
18	Unit Tranfusi Darah	1 Unit
19	Penyalur Alat Kesehatan	2 Unit
20	Apotek	185 Unit
21	Toko Obat	27 Unit
22	Toko Alkes	6 Unit

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2024

2.1.2.3 Anggaran Kesehatan

Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarkat diperlukan anggaran yang memadai. Berikut ini alokasi Anggaran Kesehatan berdasarkan program untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang yang bersumber dari APBD Kabupaten Pemalang selama 4 (empat) tahun terakhir.

Tabel 2.6 Alokasi Anggaran Kesehatan berdasarkan Program Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2024

No	Program	Anggaran (Rp.)			
		2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	330.673.229.549	371.178.777.100	391.508.736.783	410.662.001.180
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	32.867.478.849	10.487.500.000	9.059.385.000	1.952.297.500
3	Program Sediaan Farmasi. Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	310.995.367	238.542.000	473.986.000	515.631.000

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Program	Anggaran (Rp.)			
		2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	382.932.000	385.292.600	1.286.888.294	1.672.749.000
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	98.292.571.333	110.008.262.000	108.421.295.923	125.494.638.233
	Jumlah	**462.527.207.098**	**492.298.373.700**	**510.750.292.000**	**540.297.316.913**

Sumber : Sekretariat Dinkes Kabupaten Pemalang

2.1.3 KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.3.1 Indikator Kinerja Utama

1) Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator kinerja sasaran strategis dalam rangka meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Definisi operasional Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun hidup yang akan dijalani/ ditempuh oleh seseorang sejak lahir sampai pada waktu tertentu saat ia meninggal. Untuk diketahui bahwa Usia Harapan Hidup merupakan salah satu indikator penentu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu; umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak.

Data Usia Harapan Hidup di suatu daerah berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah pada urusan kesehatan dan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat. Namun pada kenyataanya UHH bukan hanya ditentukan oleh urusan kesehatan semata. melainkan urusan lainnya yang menyangkut hidup dasar manusia. Urusan ekonomi khususnya pendapatan keluarga merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi peningkatan UHH. Upaya peningkatan Usia Harapan Hidup di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

UHH Kabupaten Pemalang dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan. Merujuk data BPS, tercatat UHH tahun

https://jdih.pemalangkab.go.id

2020 sebesar 73,40 tahun dan menunjukkan grafik peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2024 sebesar 74,23 tahun. Bila dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2024 sebesar 73,80 tahun maka capaian UHH Kabupaten Pemalang tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan. Namun bila dibandingkan dengan capaian UHH Provinsi Jawa Tengah maka, UHH Kabupaten Pemalang masih dibawah rata-rata UHH Provinsi Jawa Tengah dengan gambaran capaian UHH dari tahun 2020-2024 dapat dilihat di bawah ini:

Gambar 2.5 Usia Harapan Hidup (UHH)
Kabupaten Pemalang dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020-2024

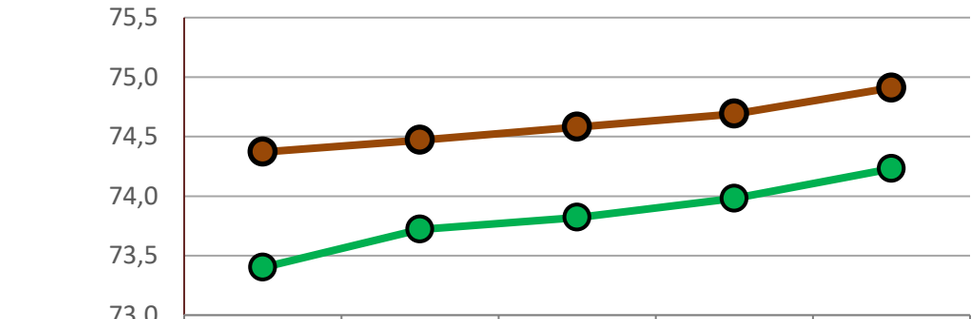

	2020	2021	2022	2023	2024
UHH JTG	74,37	74,47	74,58	74,69	74,91
UHH PML	73,40	73,72	73,82	73,98	74,23

2) Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian Ibu Maternal (AKI) merupakan indikator kinerja sasaran strategis dalam rangka meningkatnya pelayanan kesehatan ibu. Angka kematian Ibu Maternal mencerminkan risiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri.

Kejadian meninggalnya ibu maternal biasanya disebabkan oleh ketidakmampuan dalam mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama pelayanan kegawatdaruratan tepat waktu yang mana dilatarbelakangi oleh terlambat mengenal tanda bahaya dan mengambil keputusan, terlambat mencapai fasilitas kesehatan dan terlambat mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Selain itu penyebab kematian ibu maternal juga tidak lepas dari kondisi ibu itu sendiri, yaitu terlalu tua (>35 tahun) dan terlalu muda (<20 tahun) pada saat melahirkan, terlalu banyak anak (>4 anak) dan terlalu rapat jarak

https://jdih.pemalangkab.go.id

kelahiran/paritas (<2 tahun). Permasalahan tersebut diatas diakibatkan kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang perawatan kehamilan dan faktor risiko yang terjadi saat kondisi ibu hamil. bersalin dan nifas.

Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam rangka menurunkan AKI adalah upaya peningkatan pengetahuan ibu hamil dan keluarga melalui kegiatan kelas ibu hamil, memfasilitasi rumah tunggu kelahiran, melakukan kegiatan kunjungan rumah ibu hamil, kegiatan pemantauan dan pendampingan ibu hamil risti oleh masyarakat dan kader, pembinaan kader dan dukun bayi, peningkatan kompetensi bidan dalam penanganan ibu hamil dan pelayanan rujukan ibu hamil risiko tinggi serta kerjasama lintas sektoral dan pembinaan desa siaga. Selain itu juga melakukan Audit Maternal Perinatal untuk setiap adanya kasus kematian, memberikan pelatihan PONED untuk petugas medis dan paramedik di tingkat pelayanan dasar, melakukan monitoring dan evaluasi Kegiatan KIA dan implementasi juknis pelayanan KIA.

Angka Kematian Ibu di Kabupaten Pemalang hingga tahun 2024 bersifat fluktuatif. Tercatat AKI tahun 2020 sebesar 58,85 per 100.000 kelahiran hidup dan di tahun 2021 AKI Kabupaten Pemalang meningkat sebesar 129,34 per 100.000 kelahiran hidup. Selanjutnya menunjukkan grafik penurunan hingga tahun 2023 sebesar 45,14 per 100.000 kelahiran hidup dan di tahun 2024 sedikit meningkat menjadi sebesar 49,95 per 100.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dari target RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2024 sebesar sebesar 57 per 100.000 kelahiran hidup maka capaian AKI Kabupaten Pemalang telah memenuhi target yang ditetapkan.

Gambar 2.6 Angka Kematian Ibu (AKI)
Kabupaten Pemalang dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020-2024

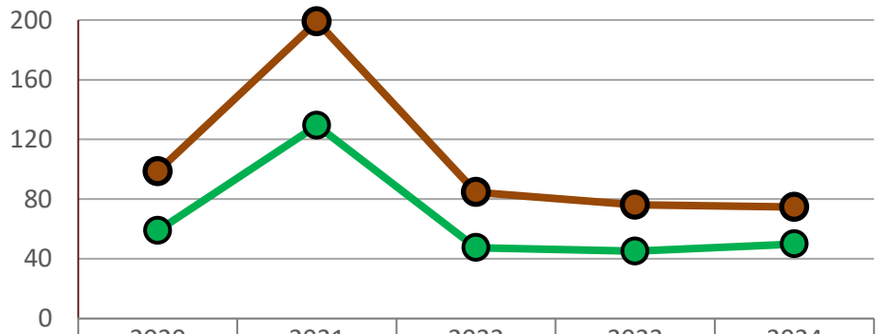

	2020	2021	2022	2023	2024
AKI JTG	98,60	199,00	84,60	76,15	74,73
AKI PML	58,85	129,34	47,48	45,14	49,95

https://jdih.pemalangkab.go.id

Namun bila dibandingkan dengan capaian AKI Provinsi Jawa Tengah maka, AKI Kabupaten Pemalang masih lebih baik dari AKI Provinsi Jawa Tengah dengan gambaran capaian AKI dari tahun 2020-2024 pada gambar diatas.

3) Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan jumlah kematian bayi (0-12 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi.

Beberapa penyebab terbanyak kematian bayi di Kabupaten Pemalang adalah Asfiksia, Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), bayi dengan kelainan kongenital, bayi dengan kelainan cardiovaskular dan respiratori serta penyakit Infeksi yang diderita oleh bayi. Permasalahan ini diakibatkan kurangnya informasi orangtua mengenai perawatan bayi, tumbuh kembang balita dan upaya pencegahan penyakit serta kondisi sanitasi tempat tinggal yang tidak sehat.

Upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan untuk menurunkan AKB adalah melalui peningkatan pengetahuan orang tua melalui kelas ibu balita, revitalisasi posyandu, pembinaan kader, sosialisasi dan kerjasama lintas sektoral, peningkatan kompetensi nakes dalam manajemen terpadu balita sakit, peningkatan pelayanan kesehatan neonatal dan bayi, pemberian imunisasi lengkap dan penanganan bayi dengan BBLR sesuai standar.

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pemalang sampai dengan tahun 2020 bersifat flutuatif. Tercatat AKB tahun 2020 sebesar 5,14 per 1.000 kelahiran hidup dan meningkat di tahun 2022 sebesar 6,5 per 1.000 kelahiran hidup, selanjutnya menunjukkan grafik penurunan sampai tahun 2024 sebesar 5,94 per 1.000 kelahiran hidup. Bila dilihat dari target RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2024 sebesar 4,9 per 1.000 kelahiran hidup maka capaian ini belum memenuhi target yang ditetapkan. Namun bila dibandingkan dengan capaian AKB Provinsi Jawa Tengah maka, AKB Kabupaten Pemalang masih lebih baik dari AKB Provinsi Jawa Tengah dengan gambaran capaian dari tahun 2020-2024 sebagai berikut.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Gambar 2.7 Angka Kematian Bayi (AKB)
Kabupaten Pemalang dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020-2024

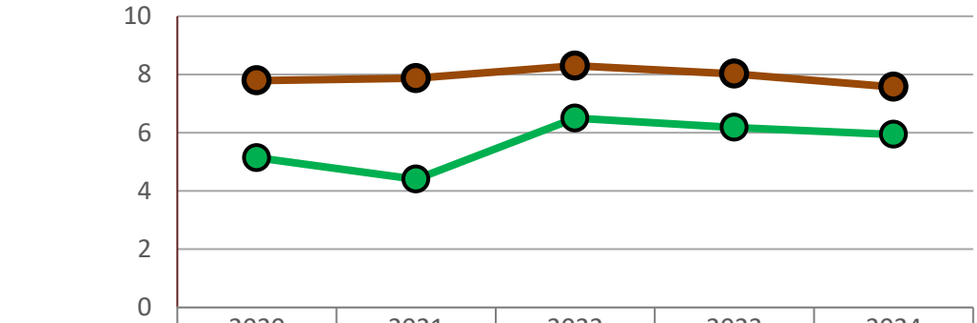

	2020	2021	2022	2023	2024
AKB JTG	7,79	7,87	8,30	8,02	7,57
AKB PML	5,14	4,40	6,50	6,18	5,94

4) Persentase Balita Stunting

Stunting (kerdil) pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak bawah lima tahun akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Faktor lingkungan berperan menyebabkan stunting pada anak antara lain status gizi ibu, tidak cukup protein dalam proporsi asupan total asupan kalori, pola pemberian makan kepada anak, kebersihan lingkungan dan kejadian penyakit infeksi di awal kehidupan anak. Selain faktor lingkungan, stunting juga disebabkan oleh faktor genetik dan hormonal namun sebagian besar disebabkan karena malnutrisi.

Upaya penurunan stunting tidak semata tugas sektor kesehatan kearena penyebab stunting penyebabnya yang multidimensi tetapi harus melalui aksi multisektoral. Intervensi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan, sementara intervensi sensitive dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Integrasi penanganan balita stunting secara lintas sektoral perlu ditingkatkan frekuensi koordinasinya, pendampingan kegiatan di posyandu, kemampuan kader dalam penggunaan alat antropometri perlu ditingkatkan agar hasil pengukuran akurat. Dalam menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Pemalang menjadi perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan.

Permasalahan yang dihadapi dalam menurunkan prevalensi stunting adalah pola asuh anak yang salah terutama diawal pemberian makanan pendamping ASI, kasus BBLR yang meningkat dan penyakit infeksi pada balita yang berulang. Upaya yang dilakukan dalam

https://jdih.pemalangkab.go.id

penurunan prevalensi stunting adalah dengan pelatihan PMBA bagi petugas dan kader, sosialisasi dan praktek PMBA di masyarakat, menurunkan angka BBLR dengan ANC terpadu, memberikan kelas ibu dan balita di tiap puskesmas dan penguatan konvergensi penanganan balita stunting.

Persentase balita stunting di Kabupaten Pemalang hingga tahun 2024 bersifat fluktuatif. Menurut data ePPGBM tercatat persentase balita stunting tahun 2020 sebesar 12,68%, selanjutnya menunjukkan tren penurunan hingga tahun 2023 sebesar 8% dan di tahun 2024 meningkat menjadi sebesar 10,33%. Bila dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2024 sebesar 9,5% maka capaian persentase balita stunting di Kabupaten Pemalang tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan menurut data SSGI, persentase balita stunting di Kabupaten Pemalang mulai tercatat di tahun 2021 sebesar 24,7%, selanjutnya menurun hingga tahun 2023 sebesar 15,3% dan di tahun 2024 meningkat menjadi sebesar 19,1%.

Gambar 2.8 Persentase Balita Stunting Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024

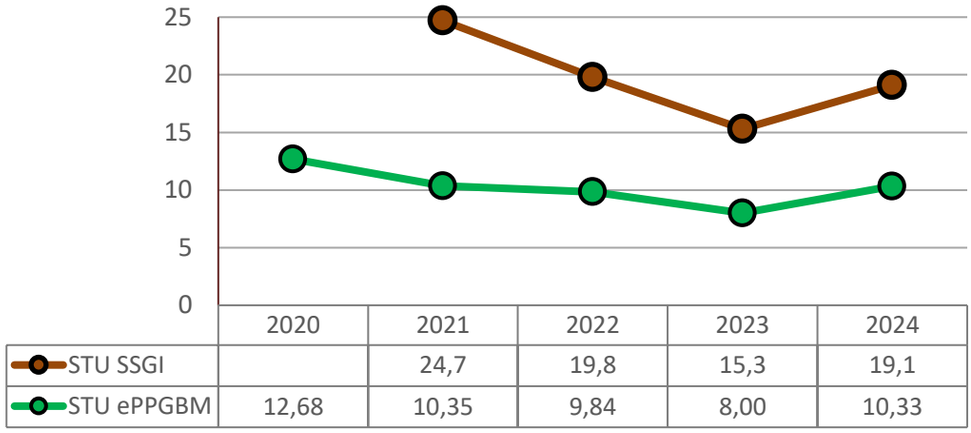

	2020	2021	2022	2023	2024
STU SSGI		24,7	19,8	15,3	19,1
STU ePPGBM	12,68	10,35	9,84	8,00	10,33

5) Indeks Keluarga Sehat

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di laksanakan untuk menunjang terlaksananya Program Indonesia Sehat khususnya pada seluruh keluarga. Kegiatannya dilaksanakan dengan cara mendatangi rumah atau kunjungan secara lansung dengan keluarga. Kunjungan rumah dilaksanakan untuk pegumpulan data, melakukan promosi kesehatan sebagai upaya promotif dan preventif, pemanfaatan data dan informasi untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dalam penyelenggaraan Program PIS-PK ini dilakukan pengumpulan data menggunakan 12 (dua belas) indikator utama sebagai penanda status kesehatan sebuah keluarga yaitu sebagai berikut:

a) keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB);
b) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
c) bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
d) bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
e) balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
f) penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;
g) penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
h) penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan;
i) anggota keluarga tidak ada yang merokok;
j) keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
k) keluarga mempunyai akses sarana air bersih; dan
l) keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Hasil pengumpulan data dari 12 indikator tersebut. selanjutnya dilakukan penghitungan untuk mengetahui Indeks Keluarga Sehat (IKS) di suatu wilayah yang besarnya berkisar 0 sampai dengan 1 dengan kategori sebagai berikut :

- Keluarga Sehat. jika nilai IKS >0.80
- Keluarga Pra Sehat. jika nilai IKS 0.50 - 0.80
- Keluarga Tidak Sehat. jika nilai IKS <0.500

Berdasarkan hasil penghitungan. Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Pemalang hingga tahun 2024 menunjukkan tren peningkatan. Tercatat Indeks Keluarga Sehat di tahun 2020 sebesar 0,17 dan menunjukkan tren penurunan hingga tahun 2024 sebesar 0,24. Dengan angka IKS tahun 2024 sebesar 0,24 maka Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Pemalang masih masuk dalam kategori Keluarga Tidak Sehat. Namun bila dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2024 sebesar 0,19 maka capaian Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Pemalang tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Gambar 2.9 Indeks Keluarga Sehat
Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024

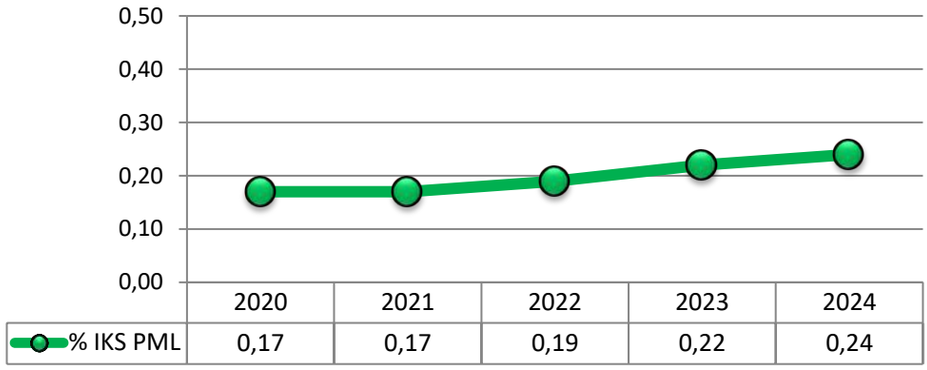

2.1.3.2 Indikator Kinerja Kunci

1) Rasio Daya Tampung Rumah Sakit

Rasio daya tampung rumah sakit mencerminkan ketersediaan tempat tidur rumah sakit di suatu wilayah per 1.000 penduduk. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, rasio ideal daya tampung RS adalah 1.000 penduduk : 1 tempat tidur, oleh karena itu angka rasio ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat ketersediaan tempat tidur rumah sakit di suatu wilayah sudah pada kondisi ideal atau belum.

Berdasarkan data rekapitulasi jumlah ketersediaan tempat tidur rumah sakit di Kabupaten Pemalang dibandingkan per 1.000 penduduk menunjukkan penurunan. Tercatat rasio daya tampung rumah sakit di tahun 2020 sebesar 0,75 dan di akhir tahun 2024 hanya sebesar 0,73.

Capaian ini tentunya masih dibawah angka rasio ideal, hal ini disebabkan pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Pemalang tidak diimbangi dengan penambahan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Namun bila dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2024 sebesar 0,77 maka capaian rasio daya tampung rumah sakit di Kabupaten Pemalang tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan.

Gambar 2.10 Rasio Daya Tampung Rumah Sakit
Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024

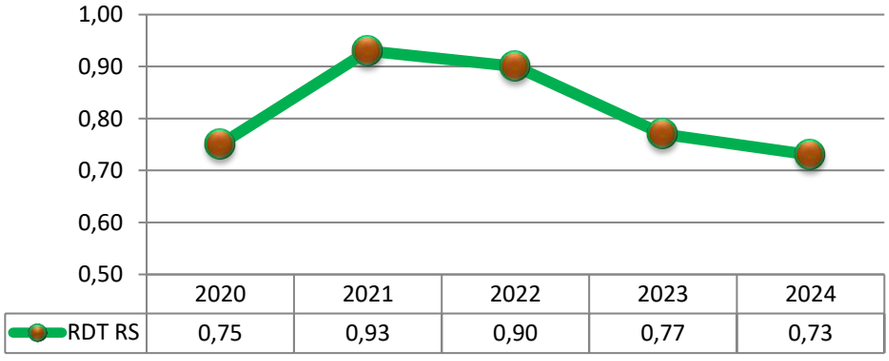

https://jdih.pemalangkab.go.id

2) Persentase RS Rujukan Terakreditasi Minimal Strata Utama

Akreditasi rumah sakit merupakan sebuah proses penilaian dan penetapan kelayakan rumah sakit berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh lembaga independen akreditasi Kementerian Kesehatan. Standar penilaian akreditasi rumah sakit menggunakan SNARS (standar nasional akkreditasi rumah sakit) yang telah disesuaikan dengan kondisi rumah sakit di Indonesia. Standar SNARS ini ditetapkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dengan mengacu pada beberapa pedoman yang terdiri dari konsep dan prosedur akreditasi internasional yang ditetapkan oleh ISQua atau The International Society for Quality in Health, perundang-undangan dan peraturan pemerintah, standar akreditasi rumah sakit KARS, serta mengacu pada kajian hasil survey standar dan element yang belum diterapkan di rumah sakit Indonesia. KARS kemudian menetapkan.

Persentase rumah sakit rujukan terakreditasi minimal strata utama di Kabupaten Pemalang hingga tahun 2024 menunjukkan tren peningkatan. Tercatat capaian di tahun 2020 sebesar 44.44% dan menunjukkan peningkatan hingga tahun 2024 sebesar 100%. Berdasarkan data yang dihimpun dari beberapa rumah sakit di Kabupaten Pemalang di tahun 2024 jumlah rumah sakit yang ada berjumlah 9 rumah sakit yang kesemuanya telah terakreditasi oleh KARS. Hasil dari akreditasi tersebut dapatkan 8 RS dengan strata paripurna dan 1 RS dengan strata utama. Dengan persentase rumah sakit rujukan terakreditasi minimal utama di Kabupaten Pemalang tahun 2024 sebesar 100% maka angka capaian ini tentunya telah melampaui target RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 40%.

Gambar 2.11 Persentase RS Rujukan Terakreditasi Minimal Strata Utama Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024

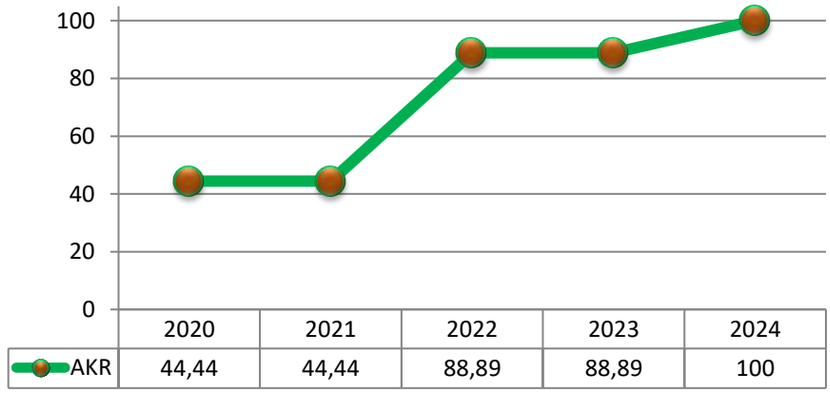

https://jdih.pemalangkab.go.id

3) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan kesehatan ibu hamil adalah pelayanan antenatal sesuai standar yang diberikan kepada ibu hamil. Pemerintah Daerah kabupaten/ kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar di Kabupaten Pemalang cenderung fluktuatif. Tercatat capaian di tahun 2020 sebesar 92,56% dan diakhir tahun 2024 sebesar 99,96%. Angka capaian akhir ini tentunya masih dibawah target SPM sebesar 100%. Untuk diketahui bahwa capaian persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar di Kabupaten Pemalang belum optimal karena masih ada masyarakat khususnya ibu hamil dan keluarganya yang belum memeriksakan kehamilannya secara berkala dan rutin dengan kunjungan 6 kali selama perode kehamilan (K6) oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

Gambar 2.12 Capaian Pelayanan Kesehatan Ibu hamil Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024

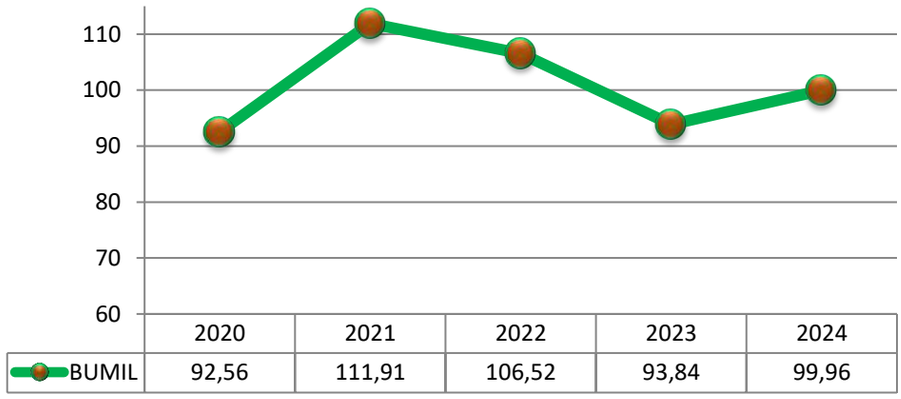

	2020	2021	2022	2023	2024
BUMIL	92,56	111,91	106,52	93,84	99,96

4) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin adalah pelayanan yang diberikan pada ibu bersalin sesuai standar yang meliputi persalinan normal dan atau persalinan komplikasi. Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar dan standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di fasyankes dasar dan rujukan. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di Kabupaten Pemalang dalam 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Untuk capaian di tahun 2020 tercatat sebesar 98,40% dan menurun capaian di akhir tahun 2024 sebesar 96,15%. Angka capaian ini tentunya masih dibawah target SPM yang ditetapkan sebesar 100%. Belum optimalnya capaian kinerja pelayanan Kesehatan ibu bersalin sesuai standar di Kabupaten Pemalang karena masih ada ibu bersalin yang melakukan persalinan di tempat lain atau bukan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan berkompetensi.

Gambar 2.13 Capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024

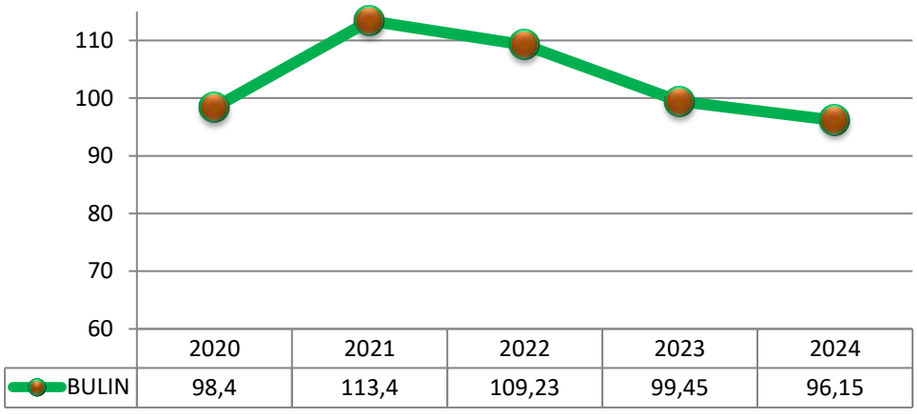

	2020	2021	2022	2023	2024
BULIN	98,4	113,4	109,23	99,45	96,15

5) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada bayi baru lahir sesuai standar dengan kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal dengan ketentuan: Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6-48 jam, Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3-7 hari dan Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8-28 hari. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar yang dimaksud adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6jam) dan Pelayanan Neonatal setelah lahir (6 jam-28 hari). Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam hal ini wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di Kabupaten Pemalang dalam lima tahun terakhir cenderung naik turun. Untuk diketahui bahwa capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir di tahun 2020 adalah sebesar

https://jdih.pemalangkab.go.id

99,58% dan sedikit meningkat di akhir tahun 2024 sebesar 100%. Namun angka capaian ini tentunya telah mencapaian target SPM yang ditetapkan sebesar 100%. Tercapainya target pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di Kabupaten Pemalang karena pelayanan kesehatan terhadap bayi baru lahir/ neonatal membutuhkan pelayanan kesehatan dengan penanganan khusus, hal ini karena bayi baru lahir/ neonatal masih dalam kondisi rentan dan memerlukan pemeriksaan dan penanganan kesehatan yang spesifik.

Gambar 2.14 Capaian Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024

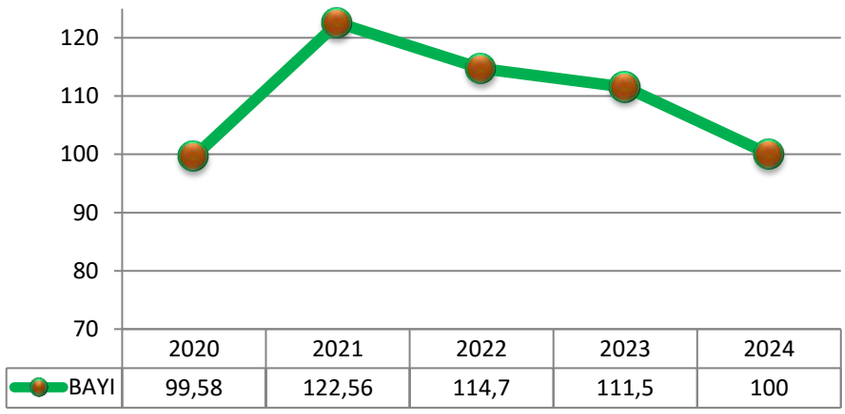

6) Pelayanan Kesehatan Balita

Pelayanan Kesehatan Balita adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi: Pelayanan kesehatan balita sehat dan Pelayanan kesehatan balita sakit, Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang menggunakan alat antropometri dan alat deteksi dini perkembangan anak di usia bayi 0-11 bulan, anak batuta 12-23 bulan dan anak balita 24-59 bulan. Sedangkan pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS). Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar di Kabupaten Pemalang cenderung meningkat. Untuk capian di tahun 2020 tercatat sebesar 68,44% dan di akhir tahun 2024 meningkat menjadi 100%. Angka capaian ini tentunya telah mencapai target SPM yang ditetapkan sebesar 100%. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai

https://jdih.pemalangkab.go.id

standar di Kabupaten Pemalang karena meningkatnya kesadaran keluarga untuk membawa anak balitanya di posyandu terdekat untuk dilakukan pemeriksaan deteksi dini dan tumbuh kembang balita.

Gambar 2.15 Capaian Pelayanan Kesehatan Balita Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024

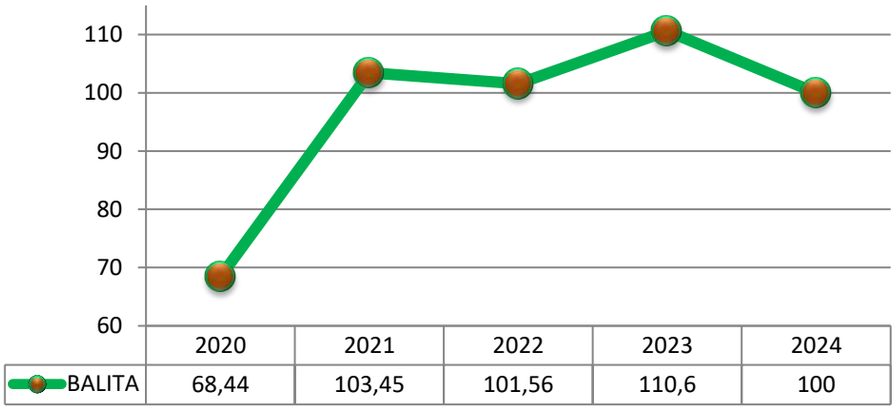

	2020	2021	2022	2023	2024
BALITA	68,44	103,45	101,56	110,6	100

7) Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar

Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga usia pendidikan dasar sesuai standar yaitu pada anak usia pendidikan SD/MI, SMP/MTS dan pondok pesantren atau kelas 1-9 (7 sampai dengan 15 tahun) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga usia pendidikan dasar meliputi pelayanan skrining kesehatan, tindak lanjut hasil skrining kesehatan dan pemberian imunisasi pada pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah (BIAS). Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran. Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar ini dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu (guru/ kader kesehatan/ dokter kecil/ *peer conselor*).

Persentase usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Pemalang dalam lima tahun terakhir cenderung meningkat, hal ini dapat dilihat di tahun 2020 dengan capaian sebesar 23,24% dan diakhir tahun 2024 meningkat menjadi 100%. Angka capaian ini tentunya telah mencapai target SPM yang ditetapkan sebesar 100%. Peningkatan capaian pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar di Kabupaten

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pemalang dikarenakan kegiatan skrining pemeriksaan kesehatan berkala pada anak didik usia pendidikan dasar sudah dapat dikoordinasikan dan dilaksanakan dengan baik.

Gambar 2.16 Capaian Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024

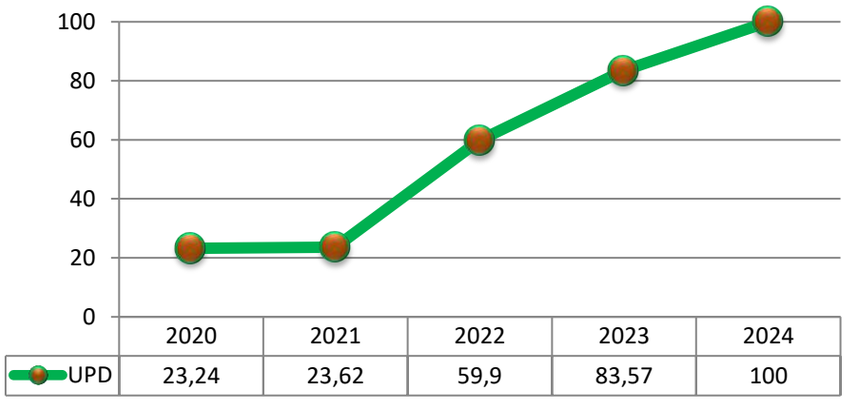

8) Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam hal ini wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining serta pelayanan kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan pada usia produktif ini dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan serta kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu.

Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun) merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga usia produktif sesuai standar yang meliputi;

1) edukasi kesehatan tentang penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2) skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular dan calon pengantin;
3) skrining status imunisasi Tetanus bagi Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-39 tahun dan pemberian imunisasi Td (bila diperlukan) berdasarkan hasil skrining status imunisasi Tetanus; dan
4) pelayanan KB.

Persentase orang usia 15-59 tahun (usia produktif) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar di Kabupaten Pemalang mengalami tren peningkatan. Untuk angka capaian di tahun 2020 tercatat sebesar 36,81% dan di akhir tahun 2024 meningkat menjadi 98,3%. Namun

https://jdih.pemalangkab.go.id

capaian ini masih dibawah target SPM yang ditetapkan sebesar 100%. Peningkatan capaian skrining kesehatan penduduk usia 15-59 tahun (usia produktif) sesuai standar ini dikarenakan adanya kegiatan posbindu di masing-masing desa/kelurahan sehingga kegiatan pelayanan skrining kesehatan penduduk usia produktif tetap dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Walaupun capaian belum optimal namun dengan tren peningkatan ini menunjukkan kegiatan pelayanan dan skrining pemeriksaan kesehatan usia produktif sudah berjalan dengan baik dan semakin menjadi terarah dengan adanya program integrasi layanan primer di masing-masing wilayah puskesmas.

Gambar 2.17 Capaian Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024

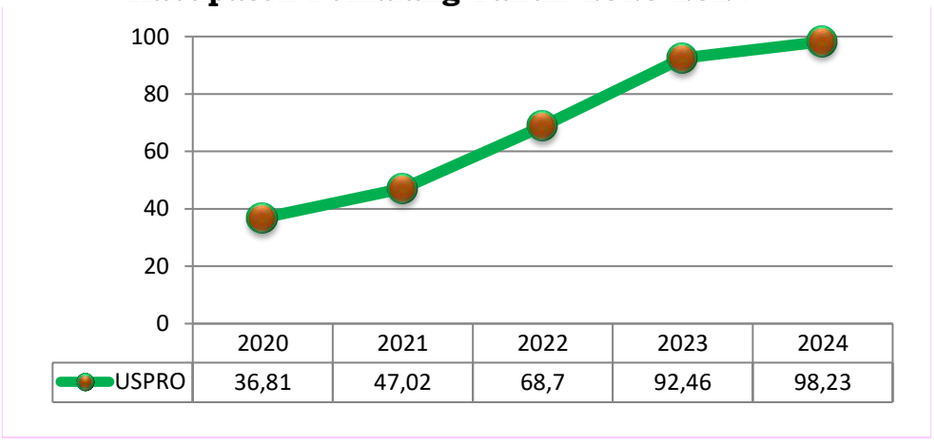

9) Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut adalah pelayanan kesehatan untuk warga usia 60 tahun ke atas sesuai standar yang meliputi; pelayanan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat pada usia lanjut; pelayanan skrining faktor risiko pada usia lanjut minimal 1 kali dalam setahun; dan tindaklanjut hasil skrining faktor risiko pada usia lanjut. Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam hal ini wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut ini dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan serta kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu.

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas (usia lanjut) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Pemalang menunjukkan tren peningkatan. Untuk capaian tahun 2020 tercatat sebesar 34,93% dan di akhir tahun 2024 meningkat sebesar 99,82%. namun angka capaian ini masih dibawah target SPM yang ditetapkan sebesar 100%.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Belum optimalnya capaian pelayanan kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas (usia lanjut) sesuai standar di Kabupaten Pemalang dikarenakan beberapa lansia belum begitu antusias dalam mengikuti kegiatan skrining pelayanan kesehatan bagi usia lanjut di posyandu lansia dan fasyankes.

Gambar 2.18 Capaian Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024

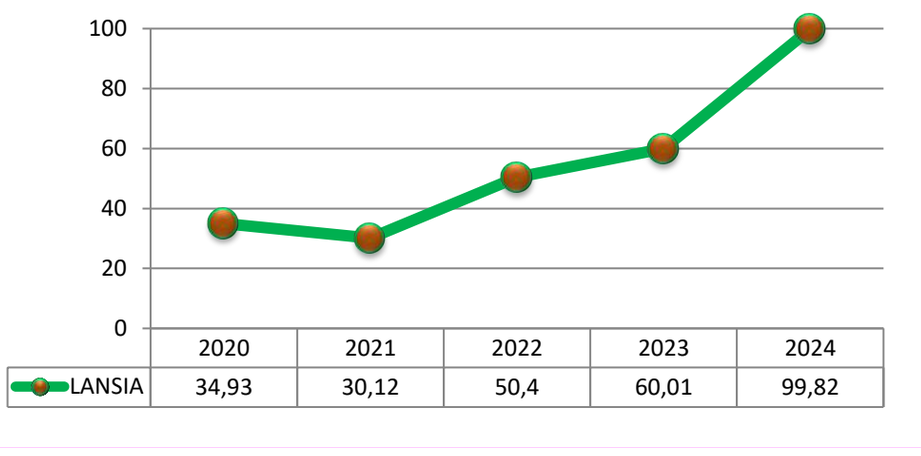

	2020	2021	2022	2023	2024
LANSIA	34,93	30,12	50,4	60,01	99,82

10) Pelayanan Kesehatan Hipertensi

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada warga penderita hipertensi sesuai standar yang meliputi; Pengukuran tekanan darah (dilakukan minimal satu kali sebulan di fasyankes); Pelayanan edukasi dan konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi; dan Melakukan rujukan jika diperlukan (penderita hipertensi dengan komplikasi). Pelayanan kesehatan hipertensi ini dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal ini wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Pemalang menunjukkan tren peningkatan. Dari data capaian tahun 2020 tercatat sebesar 13,35% dan di akhir tahun 2024 menjadi 98,28%. Angka capaian ini tentunya masih dibawah target SPM yang ditetapkan sebesar 100%. Belum optimalnya capaian pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar dikarenakan belum semua penderita hipertensi memiliki kesadaran untuk memeriksakan kesehatannya secara rutin dan berkala di fasyankes.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Gambar 2.19 Capaian Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024

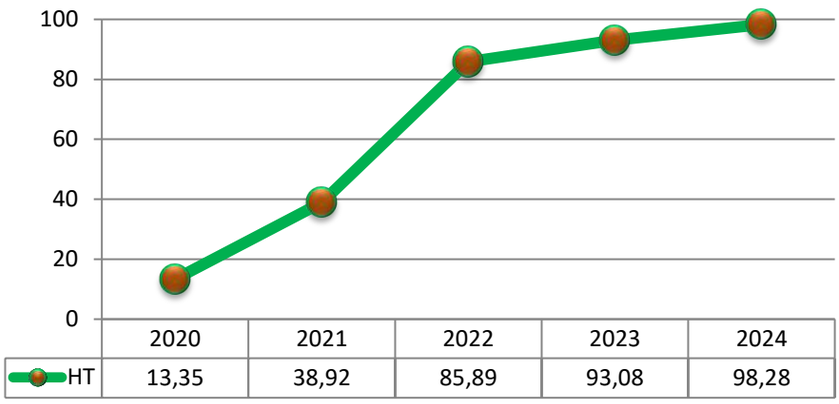

11) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi; Pemeriksaan klinis (dilakukan minimal satu kali sebulan di fasyankes); Mendapatkan pemeriksaan penunjang (minimal satu kali sebulan di fasyankes); Terapi non farmakologi (edukasi perubahan gaya hidup sehat); Terapi farmakologi sesuai kondisi pasien; dan Melakukan rujukan jika diperlukan. Pelayanan kesehatan hipertensi ini dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Persentase penderita diabetus mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Pemalang juga menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2020 tercatat angka capaian sebesar 32,73% dan diakhir tahun 2024 menjadi 100%. Angka capaian ini telah mencapaian target SPM sebesar 100%.

Gambar 2.20 Capaian Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024

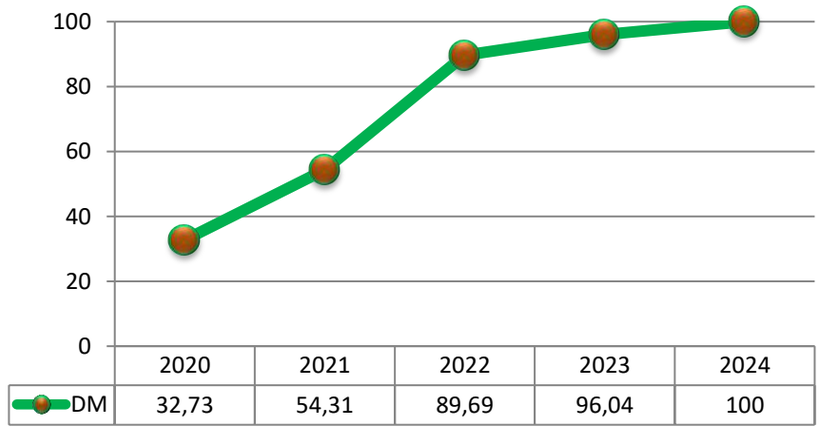

https://jdih.pemalangkab.go.id

Peningkatan capaian penderita diabetus melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Pemalang dikarenakan kebutuhan dan kesadaran penderita DM dalam memeriksakan kesehatannya secara berkala dan rutin di fasyankes.

12) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia yang meliputi: Pemeriksaan kesehatan jiwa (pemeriksaan status mental dan wawancara); Edukasi kepatuhan minum obat kepada pasien dan keluarga *caregiver*; Melakukan penatalaksanaan awal dan melakukan rujukan sesuai indikasi; dan Tindak lanjut rujuk balik dan pemantauan minum obat. Pelayanan kesehatan Penderita ODGJ Berat dilakukan oleh tenaga medis. tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih), tenaga profesional lainnya dan tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh ODGJ berat sebagai upaya pengobatan penyakit dan pencegahan timbulnya dampak sekunder akibat gangguan jiwanya (pemasungan) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar di Kabupaten Pemalang cenderung meningkat. Hal ini dilihat capaian di tahun 2020 sebesar 61,67% dan di akhir tahun 2024 mencapai sebesar 100%. Angka capaian ini tentunya telah mencapai target SPM yang ditetapkan sebesar 100%.

Gambar 2.21 Capaian Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024

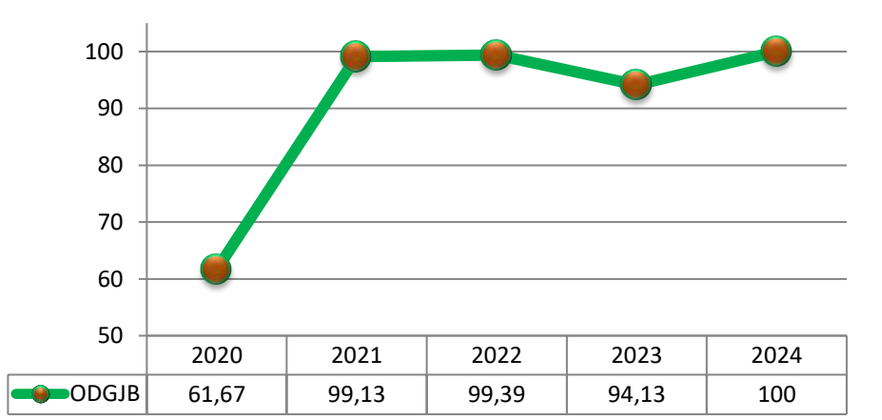

https://jdih.pemalangkab.go.id

Peningkatan capaian pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sesuai standar di Kabupaten Pemalang dikarenakan peningkatan tata kelola program kesehatan jiwa dan penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.

13) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada orang terduga TBC sesuai standar meliputi: Pemeriksaan klinis berdasarkan gejala dan tanda; Pemeriksaan penunjang terduga TBC (menggunakan Tes Cepat Molekuler (TCM), mikroskopis atau radiologis sesuai pedoman atau standar operasional prosedur yang berlaku); Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan; dan Melakukan rujukan jika diperlukan. Pelayanan kesehatan pada orang terduga TBC dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TBC di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Persentase orang terduga tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di Kabupaten Pemalang menunjukkan tren peningkatan. Dari angka capaian di tahun 2020 sebesar 29,79% meningkat di akhir tahun 2024 menjadi 94,55%. Namun angka capaian ini masih dibawah target SPM yang ditetapkan sebesar 100%. Belum optimalnya capaian pelayanan kesehatan orang terduga TBC sesuai standar di Kabupaten Pemalang karena kurangnya dukungan masyarakat terutama kader kesehatan dalam membantu penemuan penderita TBC dan orang terduga TBC.

Gambar 2.22 Capaian Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024

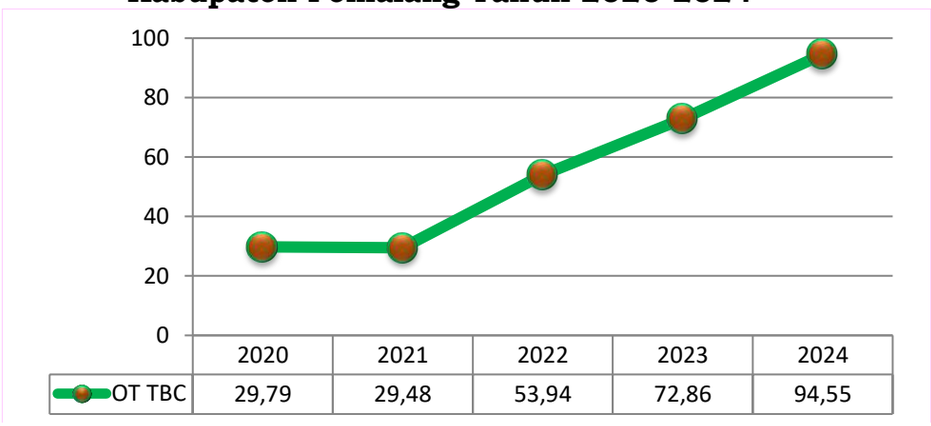

https://jdih.pemalangkab.go.id

14) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immuno-defciency Virus/ HIV*)

Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar yang meliputi: Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan; Skrining dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun; dan Melakukan rujukan jika diperlukan. Pelayanan kesehatan pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu sebagai pendamping/ penjangkauan.

Kategori orang dengan risiko terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar antara lain: Ibu hamil, Pasien TBC, Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), Penjaja seks, Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), Transgender/waria, Pengguna napza suntik (penasun) dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus = HIV*) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar di Kabupaten Pemalang menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 sebesar 30,87% hingga tahun 2023 sebesar 99,16% namun sedikit menurun di akhir tahun 2024 menjadi 86,58%. Tentunya angka capain ini masih dibawah target SPM yang ditetapkan sebesar 100%. Belum optimalnya capaian pelayanan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar di Kabupaten Pemalang karena sulitnya menemukan sasaran berisiko terinfeksi HIV dan rendahnya kesadaran untuk melakukan skrining/deteksi dini pemeriksaan HIV secara berkala dan rutin.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Gambar 2.23 Capaian Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024

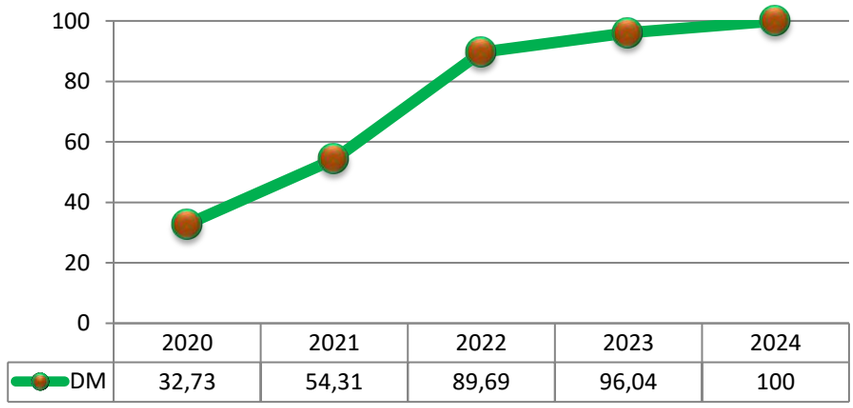

	2020	2021	2022	2023	2024
DM	32,73	54,31	89,69	96,04	100

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*
A	**INDIKATOR KINERJA UTAMA**																		
1	Usia harapan hidup (Tahun)	73,8	-	-	73,4	3,5	73,6	73,7	73,8	73,4	73,72	73,82	73,98	74,23	100,00	100,30	100,30	100,38	100,58
2	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	57	-	-	59	59	58	58	57	58,85	129,34	47,48	45,14	49,95	100,25	19,22	118,14	122,17	112,37
3	Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	4,9	-	-	5	5	5	4,9	4,9	5,14	4,4	6,5	6,18	5,94	97,20	112,00	70,00	73,88	78,78
4	Persentase balita stunting (%)	9,5	-	-	14	14	12	10	9,5	12,68	10,35	9,84	8,00	10,33	109,43	126,07	118,00	120,00	91,26
5	Indeks keluarga sehat (Indeks)	0,19	-	-	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,17	0,17	0,19	0,22	0,24	100,00	100,00	105,56	122,22	126,32
B	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**																		
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (per 1.000 penduduk)	-	0,77	-	0,75	0,75	0,76	0,76	0,77	0,75	0,93	0,90	0,77	0,73	100,00	124,00	118,42	101,32	94,81
2	Persentase rumah sakit rujukan Kabupaten/ kota yang terakreditasi (%)	-	40	-	40	40	40	40	40	44,44	44,44	88,89	88,89	100	111,10	111,10	222,23	222,23	250,00
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	-	100	-	100	100	100	100	100	92,56	111,91	106,52	93,84	99,96	92,56	111,91	106,52	93,84	99,96
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	-	100	-	100	100	100	100	100	98,40	113,40	109,23	99,45	96,15	98,40	113,40	109,23	99,45	96,15
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	-	100	-	100	100	100	100	100	99,58	122,56	114,70	111,50	100	99,58	122,56	114,70	111,50	100,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	-	100	-	100	100	100	100	100	68,44	103,5	101,56	110,06	100	68,44	103,50	101,56	110,06	100,00
7	Persentase usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	-	100	-	100	100	100	100	100	23,24	23,62	59,90	83,57	100	23,24	23,62	59,90	83,57	100,00
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	-	100	-	100	100	100	100	100	36,81	47,02	68,70	92,46	98,23	36,81	47,02	68,70	92,46	98,23
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	-	100	-	100	100	100	100	100	34,93	30,12	50,40	60,01	99,82	34,93	30,12	50,40	60,01	99,82
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	-	100	-	100	100	100	100	100	26,41	38,92	85,89	93,08	98,28	26,41	38,92	85,89	93,08	98,28
11	Persentase penderita diabetus mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	-	100	-	100	100	100	100	100	32,73	54,31	89,69	96,04	100	32,73	54,31	89,69	96,04	100,00
12	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	-	100	-	100	100	100	100	100	61,67	99,13	99,39	94,13	100	61,67	99,13	99,39	94,13	100,00
13	Persentase orang terduga tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	-	100	-	100	100	100	100	100	29,79	29,48	53,94	72,86	94,55	29,79	29,48	53,94	72,86	94,55
14	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	-	100	-	100	100	100	100	100	30,87	58,69	93,25	99,16	86,58	30,87	58,69	93,25	99,16	86,58

Sumber : Laporan Kinerja Dinkes Kabupaten Pemalang Tahun 2020 s.d 2024

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sementara itu untuk mengetahui penilaian capaian kinerja anggaran selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja anggaran dengan membandingkan antara pagu/ target anggaran dan realisasi anggaran. Dari hasil perhitungan tersebut dapat dianalisis tingkat capaian dari realisasi anggaran dari masing-masing capaian program. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas, untuk menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan fungsinya dalam penyediaan dan memberikan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Untuk melaksanakan program guna mencapai tujuan dan sasaran tahun 2021-2024. Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang mendapatkan total anggaran belanja selama 4 tahun sebesar Rp. 2.003.563.004.711.-. sedangkan total realisasi belanja tahun 2021-2024 sebesar Rp. 1.717.580.027.119.- Persentase rata-rata capaian kinerja anggaran belanja langsung tahun 2021-2024 adalah sebesar 85,73%.

Rincian anggaran dan realisasi anggaran berdasarkan belanja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang

Uraian	Anggaran Tahun				Realisasi Anggaran Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
BELANJA DAERAH	**462.527.207.098**	**492.298.373.700**	**508.440.107.000**	**540.297.316.913**	**396.103.098.068**	**394.140.894.414**	**435.287.679.520**	**492.048.355.117**	**0,86**	**0,80**	**0,86**	**0,91**	**0,04**	**0,07**
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	330.673.229.549	371.178.777.100	390.141.863.077	410.662.001.180	265.470.215.359	276.970.513.891	320.541.856.912	375.077.496.170	0,80	0,75	0,82	0,91	0,06	0,12
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	32.867.478.849	10.487.500.000	9.059.385.000	1.952.297.500	32.739.408.098	10.215.766.624	7.898.713.930	1.753.243.678	1,00	0,97	0,87	0,90	-0,51	-0,62
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	310.995.367	238.542.000	473.986.000	515.631.000	299.073.900	235.482.000	473.689.000	501.246.320	0,96	0,99	1,00	0,97	0,13	0,19
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	382.932.000	385.292.600	343.577.000	1.672.749.000	371.884.000	384.121.560	341.937.900	441.394.756	0,97	1,00	1,00	0,26	0,45	0,06
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	98.292.571.333	110.008.262.000	108.421.295.923	125.494.638.233	97.222.516.711	106.335.010.339	106.031.481.778	114.274.974.193	0,99	0,97	0,98	0,91	0,06	0,06

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinkes Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2024

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan yang terkait dengan pelaksanaan program-progran pembangunan kesehatan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang adalah:

1) Seluruh Masyarakat mulai dari ibu hamil, ibu bersalin, bayi, anak balita, anak sekolah, remaja, usia produktif hingga usia lanjut (siklus hidup);
2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
3) Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) seperti: Posyandu, Posbindu, Poskesdes, Poskestren hingga Pos UKK.
4) Kader Kesehatan;
5) Kelurahan, Desa dan Kecamatan;
6) Sarana Pendidikan;
7) Pondok Pesantren;
8) Tempat dan Fasilitas Umum. seperti: Pasar, Sekolah dan Tempat Ibadah;
9) Tempat Pengelolaan Pangan, seperti: PIRT. Jasa Boga, Restoran, Rumah Makan, Depot Air Minum, Kelompok Gerai/Sentra Pangan Jajanan/Kantin;
10) Perkantoran dan Perusahaan.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Mitra perangkat daerah yang turut serta membantu dalam pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang. sebagai berikut:

1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan;
2) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pemalang;
3) Tim Penggerak PKK Kabupaten Pemalang;
4) Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes);
5) Organisasi Profesi Kesehatan. seperti: IDI. PDGI. PPNI. IBI. IAI. IAKMI HAKLI dan lainnya.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Pemalang yang turut mendukung pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang adalah PDAM Tirta Mulia Pemalang yang turut menyediakan masyarakat memiliki akses air bersih yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. sehingga mencegah timbulnya penyakit yang disebabkan oleh konsumsi air yang tidak bersih/ tidak memenuhi standar.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATREGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Mendasarkan pada hasil identifikasi permasalahan berdasarkan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, maka didapatkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1) Masih adanya kasus kematian ibu, bayi dan balita
   a. Risiko tinggi kehamilan dan melahirkan akibat kondisi ibu hamil yang tidak sehat menyebabkan komplikasi kebidanan;
   b. Masih ditemukan kasus anemi pada ibu hamil dan wanita usia subur serta beberapa diantarannya kekurangan energi kalori;
   c. Keterlambatan/ ketidakmampuan dalam mengakses pemanfatan pelayanan prenatal dan obstetri;
   d. Belum semua ibu hamil memeriksakan kehamilan secara lengkap dan mendapat pelayanan antenatal sesuai standar;
   e. Masih ada ibu bersalin yang melakukan persalinan tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau dengan tenaga kesehatan yang kompeten;
   f. Belum semua ibu nifas mendapat pelayanan kesehatan pasca persalinan sesuai standar.
   g. Masih ditemukannya kasus komplikasi neonatal dan bayi resiko tinggi dengan berat badan lahir rendah;
   h. Belum semua bayi baru lahir mendapat pelayanan neonatal sesuai standar;
   i. Masih ada bayi yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap;
   j. Masih banyak anak baduta yang belum mendapatkan imunisasi lanjutan;
   k. Rendahnya kesadaran orang tua memeriksakan tumbuh kembang balita di posyandu minimal 8 kali/tahun.
2) Masih adanya kasus balita stunting dan gizi buruk
   a. Rendahnya asupan balita terhadap makanan bergizi, vitamin dan mineral serta buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani;
   b. Kurang baiknya pola asuh bayi dan balita;
   b. Akses sanitasi dan air bersih keluarga yang rendah;
   c. Beberapa temuan kasus balita gizi buruk disertai dengan penyakit infeksi kronis.
3) Masih adanya kasus penyakit menular dan semakin meningkatnya kasus penyakit tidak menular

https://jdih.pemalangkab.go.id

a. Masih ditemukannya kasus TB baru dan kasus TB MDR (Multi Drug Resistance) akibat tidak tuntas/ tidak teratur dalam meminum obat TB;
b. Kasus ISPA/pneumonia dan Diare masih menjadi penyakit terbanyak yang terjadi pada anak balita;
c. Kasus kusta baru masih saja ditemukan setiap tahunnnya;
d. Upaya penemuan dan pengobatan HIV/ AIDS belum optimal;
e. Eliminasi kasus DBD belum berjalan baik sebab masyarakat enggan melakukan PSN.
f. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini terhadap faktor risiko hipertensi, diabetes melitus, kanker dan kesehatan jiwa;
g. Masyarakat usia produktif dan lansia masih enggan melakukan pemeriksaan kesehatan berkala di fasilitas pelayanan kesehatan maupun di posbindu dan posyandu lansia.

4) Belum optimalnya pelayanan kesehatan penanggulangan KLB, Bencana dan Krisis Kesehatan
   a. Pemalang termasuk daerah rawan bencana namun penanggulangan KLB/ bencana/ krisis kesehatan belum terkoordinasi dengan baik;
   b. Ketersediaan sarana prasarana kesehatan untuk pelayanan kesehatan akibat bencana/ KLB/ krisis kesehatan belum sesuai kebutuhan;
5) Belum optimalnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
   a. Belum membudayanya perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga;
   b. Kegiatan penyuluhan PHBS dan keluarga sehat belum lakukan secara optimal.
6) Masih ada masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan aktif
   a. Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas data kemiskinan dan data penerima jaminan kesehatan lintas sektor;
   b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat berpenghasilan menengah keatas dan pekerja sektor informal untuk mengikuti program jaminan kesehatan secara mandiri.
7) Standarisasi mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan belum optimal
   a. Masih ada jenis dan jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan di fasilitas kesehatan yang belum memenuhi standar;

https://jdih.pemalangkab.go.id

b. Masih ada puskesmas dan rumah sakit yang belum terakreditasi paripurna;
c. Kurangnya tenaga yang memahami tata kelola pelayanan kesehatan FKTP dan FKTL.

8) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan dan pemerataan tenaga kesehatan strategis
   a. Masih kurangnya kapasitas dan kuantitas SDM di Dinas Kesehatan sehingga beban kerja pegawai terlalu besar;
   b. Belum terpenuhi jenis tenaga kesehatan sesuai standar di puskesmas;
   c. Masih kurangnya pembinaan terhadap mutu/ kualitas tenaga kesehatan;
   d. Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan strategis masih kurang;
   e. Perencanaan, pemenuhan dan distribusi SDM Kesehatan khususnya tenaga kesehatan belum terkoodinasi dengan baik.
9) Pelayanan publik di Dinas Kesehatan belum berjalan optimal
   a. Perlunya peningkatan pelayanan publik satu pintu;
   b. Kurangnya kualitas sarana dan prasarana;
   c. Belum optimalnya informasi publik sesuai ketentuan peraturan;
   d. Perlunya peningkatan inovasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat;

2.2.2 Isu Strategis

Penentuan isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas suatu daerah dan masyarakat di masa datang guna memecahkan permasalahan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Dengan memperhatikan gambaran pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, maka isu-isu strategis dari hasil identifikasi permasalahan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat dan pentingnya PHBS akan memiliki dampak pada penurunan kasus kematian, kasus stunting, kasus kesakitan penyakit menular dan tidak menular.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2. Peningkatan kualitas lingkungan sehat.

   Terciptanya lingkungan sehat dengan menjaga kebersihan lingkungan akan memberikan dampak pada akses sanitasi yang layak bagi masyarakat sehingga meningkatkan status kesehatan masyarakat. Akses sanitasi yang layak tersebut meliputi: penyediaan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan, pengelolaan limbah yang baik, pengendalian vektor penyakit seperti nyamuk dan lalat, serta penyediaan tempat fasilitas umum dan lingkungan yang bersih dan sehat.

3. Pemerataan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan.

   Mendorong peningkatan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dalam upaya mendukung *Universal Health Coverage* yang memastikan setiap warga memiliki akses ke pelayanan kesehatan berkualitas baik dan biaya terjangkau tanpa mengalami kesulitan finansial. Selain itu usaha meningkatan kualitas pelayanan kesehatan termasuk dalam hal ini peningkatan fasilitas kesehatan; ketersediaan alat kesehatan, obat-obatan, vaksin dan perbekalan kesehatan; serta pemerataan SDM Kesehatan yang kompeten yang memenuhi standar juga turut meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.9 Rumusan Isu Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1) UKBM ada di setiap Desa 2) Posyandu ada di setiap Dusun/ RW 3) Ketersediaan Dana Desa untuk kesehatan sudah dimanfaatkan di semua desa dan kelurahan 4) Keberadaan tenaga kesehatan di semua desa dan kelurahan 5) Puskesmas, Pustu, Poskesdes hingga Posbindu melakukan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis 6) Semua Puskesmas dan Rumah Sakit Sudah Terakreditasi	1) Kasus kematian ibu, bayi dan balita 2) Kasus balita stunting dan gizi buruk 3) Kasus penyakit menular, seperti TB, HIV, Kusta, ISPA, DBD dan Kasus penyakit tidak menular, seperti Hipertensi, DM, kanker, kesehatan jiwa 4) Kasus KLB, Bencana/ Krisis kesehatan 5) Perilaku hidup bersih dan sehat keluarga belum optimal 6) Kepesertaan JKN aktif 7) Mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan belum optimal	1) Kualitas hidup sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan 2) Belum meratanya distribusi kesejahteraan masyarakat 3) Ancaman keberlanjutan kualitas dan kuantitas sumber daya air 4) Peningkatan ancaman risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim 5) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik, keamanan dan kapasitas keuangan daerah	1) Ledakan populasi 2) Pemanasan global 3) Pengaruh gaya hidup 4) Polusi lingkungan 5) Sanitasi dan air bersih 6) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 7) Kelembagaan yang tangguh	1) Bonus Demografi 2) Perubahan iklim 3) Bencana alam 4) Pencemaran lingkungan 5) Hilirisasi tambang 6) Krisis air bersih 7) Sanitasi buruk 8) Biaya pengobatan/ kesehatan 9) Pendidikan berkualitas 10) Tingkat kemiskinan 11) Inovasi dan digitalisasi	1) Masih tingginya masalah kesehatan seperti AKI, AKB, Stunting, Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular 2) Angka kesakitan dan kematian akibat KLB, Bencana, Krisis Kesehatan 3) Permasalahan sampah dan limbah 4) Sanitasi layak dan akses air bersih 5) Beban biaya kepesertaan masyarakat miskin 6) Penimngkatan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	1) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 2) Kualitas lingkungan Sehat 3) Akses dan mutu pelayanan kesehatan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
	8) Kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan belum optimal 9) Pelayanan publik belum optimal					

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1.1 Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang

Visi Pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 merupakan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Pemalang adalah :

“PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA”.

Visi ini memiliki pembentuk kata dengan makna sebagai berikut:

1. Bersih, dimaknai Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan.
2. Cakap, dimaknai memiliki sumber daya manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
3. Handal, dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.
4. Mulya, Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius. Mulya ini juga menjadi Visi dari RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi yang disampaikan secara jelas sebagai arahan dalam merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah dan pedoman stakeholder terkait untuk dirumus-kan ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029, ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Misi 1 Resik, menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih.
   Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik.
2. Misi 2 Hijau, meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sektor unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi berdasarkan potensi lokal yaitu peningkatan pengelolaan pertanian yang ramah lingkungan, hilirisasi pertanian, pengembangan industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong proses sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.
3. Misi 3 Apik, meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penataan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ke tingkat desa. Membangun Pemalang dari desa sampai kota.
4. Misi 4 Peduli, meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi.
5. Misi 5 Silaturahmi, meningkatkan masyarakat rukun, guyup, gotong royong, tepa selira dan sejahtera.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, saling menghormati serta kepedulian terhadap sesama.
6. Misi 6 Organisatoris, meningkatkan pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Misi ini mengandung

https://jdih.pemalangkab.go.id

pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan *Good Governance*, *Clean Gotujuavernance* dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.

7. Misi 7 Digitalisasi, memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi.
8. Misi 8 Ikhlas, menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat pemalang untuk semua kalangan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, mengembangkan kearifan dan budaya lokal.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 sebagai upaya dalam menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Pemalang periode Tahun 2025-2029, terutama misi keempat yaitu Peduli, meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat. Tujuan dari RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 terkait urusan kesehatan adalah meningkatkan daya saing pembangunan daerah dengan salah satu sasarannya yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selanjutnya dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang diperlukan penetapan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Kesehatan untuk lima tahun mendatang.

Tujuan adalah implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh organisasi perangkat daearah di masa mendatang dalam jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Untuk menjabarkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 maka Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 adalah Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja tujuan adalah Usia Harapan Hidup (UHH).

3.1.2 Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan secara nyata oleh organisasi perangkat daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Dalam menetapkan sasaran dirancang pula indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator kinerja sasaran disertai dengan rencana target tingkat capaiannya. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud maka dalam rangka pencapaian tujuan ditetapkan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja sasaran :
   1) Jumlah Kematian Ibu;
   2) Jumlah Kematian Balita;
   3) Prevalensi Stunting;
   4) Angka Populasi Bebas Penyakit Menular;
   5) Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular; dan
   6) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan indikator kinerja sasaran :
   1) Indeks Kepuasan Masyarakat;
   2) Nilai Sakip Perangkat Daerah.

Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang serta Indikator dan Target dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang

Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian						Ket.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(4)*	*(5)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,23	74,50	74,75	75,00	75,25	75,50	75,75	IUP, RIBK
		1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah Kematian Ibu	Kasus	10	10	10	10	10	9	9	RIBK
			Jumlah Kematian Balita	Kasus	123	120	118	116	114	112	110	RIBK
			Prevalensi Stunting	%	19,10	19,00	18,75	18,50	18,25	18,00	17,75	IUP, RIBK
			Angka Populasi Bebas Penyakit Menular	%	0	24	32	40	48	56	64	
			Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular	%	0	60	64	68	72	76	80	
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	0	59,5	59,5	59,5	68,5	68,5	77,5	RIBK
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89,09	89,1	89,2	89,3	89,4	89,5	89,5	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	63,61	65	66	67	68	69	70	

https://jdih.pemalangkab.go.id

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

3.2.1 Strategi

Strategi Renstra perangkat daerah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/ upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program, kegiatan, sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan komitmen perangkat daerah dalam memegang prinsip sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan arah pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana tujuan dan sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dengan sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Strategi Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan, melalui Optimalisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan; Peningkatan pengelolaan integrasi layanan primer dan layanan rujukan; dan meningkatkan standarisasi mutu pelayanan kesehatan.
2. Meningkatnya status kesehatan keluarga, melalui Peningkatan keselamatan ibu dan anak; Peningkatan pelayanan gizi masyarakat; dan Peningkatan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup.
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit, melalui Peningkatan penemuan dan penanganan penyakit menular strategis seperti, TB, HIV dan DBD; Peningkatan deteksi dini dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan Mendorong peningkatan akses air bersih dan higiene sanitasi.
4. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat, dengan peningkatan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat; dan Peningkatan dan pengembangan pengelolaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).

https://jdih.pemalangkab.go.id

5. Pemenuhan sediaan farmasi, perbekalan kesehatan, alat kesehatan dan makanan minuman, melalui Pemenuhan ketersediaan obat-obatan vaksin, perbekalan dan alat kesehatan; dan Peningkatan dan pengawasan keamanan pangan.
6. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan, melalui Peningkatan kualitas perencanaan, pendayagunaan dan kompetensi SDM Kesehatan.
7. Meningkatnya pelayanan publik dengan mengedepankan pelayanan prima guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, melalui Penguatan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada peningkatan kepuasan pelanggan dan mendorong peningkatan akuntanbilitas dan reformasi birokrasi di Dinas Kesehatan.

Tahapan Strategi Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Tahapan Strategi dalam rangka Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan Pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat	Peningkatan status kesehatan keluarga dan pelayanan kesehatan siklus hidup	Peningkatan surveilans kesehatan dalam upaya penurunan penyakit tidak menular	Peningkatan surveilans kesehatan dalam upaya penurunan dan eliminasi penyakit menular strategis	Terwujudnya masyarakat pemalang sehat

3.2.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Renstra perangkat daerah adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam mencapai target tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada perangkat daerah agar lebih optimal dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang adalah suatu cara/ pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan

https://jdih.pemalangkab.go.id

tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan.

Keterkaitan Operasionalisasi NSPK, Arah Kebijakan RPJMD dan Arah Kebijakan Perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Arah Kebijakan
Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Pemantapan kualitas layanan dan fasilitas kesehatan dengan fokus perbaikan gizi masyarakat, pemeriksaan kesehatan rutin, dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta penguatan Desa Siaga.	1. Peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan; 2. Peningkatan pengelolaan integrasi layanan primer di puskesmas dan meningkatkan pengelolaan layanan rumah sakit rujukan; 3. Peningkatan sinergitas pengelolaan UKM & UKP; 4. Pemantapan sistem rujukan kesehatan terintegrasi; 5. Peningkatan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu; 6. Peningkatan standarisasi mutu pelayanan kesehatan; 7. Peningkatan cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional; 8. Pengembangan sistem informasi kesehatan daerah yang terintegrasi; 9. Peningkatan pembangunan dan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan berikut ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar; 10. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan ibu maternal dan neonatal; 11. Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita termasuk tumbuh kembangnya; 12. Percepatan penurunan dan penanganan balita stunting dan gizi buruk; 13. Peningkatan pelayanan gizi masyarakat; 14. Peningkatan pelayanan kesehatan anak usia sekolah, usia produktif dan usia lanjut; 15. Peningkatan pelayanan kesehatan lingkungan dan menyelenggarakan kabupaten sehat; 16. Peningkatan akses air bersih dan perilaku higiene sanitasi; 17. Peningkatan penemuan dan penanganan penyakit menular strategis;	

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			18. Peningkatan deteksi dini dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; 19. Penguatan sistem surveilans, kewaspadaan dini dan respon cepat terhadap penyakit yang berpotensi menyebabkan wabah/ KLB; 20. Penguatan sistem penanggulangan KLB, bencana dan krisis kesehatan; meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap dan desa/ kelurahan UCI; 21. Peningkatan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih sehat; 22. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat, swasta dan lintas sektor dalam kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); 23. Peningkatan pengembangan dan pengelolaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM); 24. Peningkatan ketersediaan obat-obatan termasuk vaksin dan perbekalan kesehatan; 25. Penguatan sistem logistik farmasi sampai tingkat puskesmas; 26. Peningkatan pembinaan sarana pelayanan kefarmasian, toko alat kesehatan, optikal dan UMOT; 27. Peningkatan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan; 28. Peningkatan kualitas perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan; 29. Peningkatan pengembangan kualitas dan kompetensi SDM Kesehatan; 30. Peningkatan koordinasi dan peran organisasi profesi kesehatan dalam pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan; 31. Penguatan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada peningkatan kepuasan pelanggan; 32. Peningkatan kreativitas pengembangan inovasi pelayanan kesehatan; 33. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi guna peningkatan pelayanan kesehatan, 34. Menguatkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pelayanan kesehatan;	

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			35. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penatausahaan keuangan dan aset daerah; 36. Peningkatan peningkatan akuntanbilitas kinerja dan reformasi birokrasi di Dinas Kesehatan.	

Arah kebijakan yang diambil Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dalam rangka pelaksanan strategi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
2. Peningkatan pengelolaan integrasi layanan primer di puskesmas dan meningkatkan pengelolaan layanan rumah sakit rujukan;
3. Peningkatan sinergitas pengelolaan UKM & UKP;
4. Pemantapan sistem rujukan kesehatan terintegrasi;
5. Peningkatan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu;
6. Peningkatan standarisasi mutu pelayanan kesehatan;
7. Peningkatan cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional;
8. Pengembangan sistem informasi kesehatan daerah yang terintegrasi;
9. Peningkatan pembangunan dan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan berikut ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar;
10. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan ibu maternal dan neonatal;
11. Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita termasuk tumbuh kembangnya;
12. Percepatan penurunan dan penanganan balita stunting dan gizi buruk;
13. Peningkatan pelayanan gizi masyarakat;
14. Peningkatan pelayanan kesehatan anak usia sekolah, usia produktif dan usia lanjut;
15. Peningkatan pelayanan kesehatan lingkungan dan menyelenggarakan kabupaten sehat;
16. Peningkatan akses air bersih dan perilaku higiene sanitasi;
17. Peningkatan penemuan dan penanganan penyakit menular strategis;
18. Peningkatan deteksi dini dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

https://jdih.pemalangkab.go.id

19. Penguatan sistem surveilans, kewaspadaan dini dan respon cepat terhadap penyakit yang berpotensi menyebabkan wabah/ KLB;
20. Penguatan sistem penanggulangan KLB, bencana dan krisis kesehatan; meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap dan desa/ kelurahan UCI;
21. Peningkatan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih sehat;
22. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat, swasta dan lintas sektor dalam kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
23. Peningkatan pengembangan dan pengelolaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM);
24. Peningkatan ketersediaan obat-obatan termasuk vaksin dan perbekalan kesehatan;
25. Penguatan sistem logistik farmasi sampai tingkat puskesmas;
26. Peningkatan pembinaan sarana pelayanan kefarmasian, toko alat kesehatan, optikal dan UMOT;
27. Peningkatan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan;
28. Peningkatan kualitas perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan;
29. Peningkatan pengembangan kualitas dan kompetensi SDM Kesehatan;
30. Peningkatan koordinasi dan peran organisasi profesi kesehatan dalam pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan;
31. Penguatan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada peningkatan kepuasan pelanggan;
32. Peningkatan kreativitas pengembangan inovasi pelayanan kesehatan;
33. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi guna peningkatan pelayanan kesehatan,
34. Menguatkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pelayanan kesehatan;
35. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penatausahaan keuangan dan aset daerah;
36. Peningkatan peningkatan akuntanbilitas kinerja dan reformasi birokrasi di Dinas Kesehatan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

Program dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 ini telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan menjadi program prioritas RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Rencana program prioritas selanjutnya dijabarkan oleh Dinas Kesehatan ke dalam rencana kegiatan dan sub kegiatan pada setiap program. Pemilihan kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing program didasarkan atas tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kesehatan yang telah ditetapkan.

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

   Program ini diarahkan pada peningkatan cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis; cakupan imunisasi bayi lengkap; cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional; angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis; persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; persentase orang dengan HIV mendapat pengobatan antiretroviral (ARV); indeks SPM kesehatan keluarga; persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat; persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna; persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan

https://jdih.pemalangkab.go.id

sesuai standar; *Net Death Rate* (NDR) RSUD; dan *Bed Occupation Rate* (BOR) RSUD, dengan fokus kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
   (1) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya;
   (2) Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas;
   (3) Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
   (4) Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas;
   (5) Sub Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
   (6) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit;
   (7) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas;
   (8) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
   (9) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
   (10) Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi;
   (11) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
   (12) Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit;
   (13) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan;
   (14) Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan.
2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   (1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
   (2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
   (3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
   (4) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita;
   (5) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
   (6) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
   (7) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;

https://jdih.pemalangkab.go.id

(8) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
(9) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
(10) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
(11) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis;
(12) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV;
(13) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB);
(14) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana;
(15) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat;
(16) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga;
(17) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
(18) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan;
(19) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya;
(20) Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan;
(21) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK);
(22) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA;
(23) Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan;
(24) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular;
(25) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
(26) Sub Kegiatan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah;
(27) Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional;
(28) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
(29) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit;

https://jdih.pemalangkab.go.id

(30) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas;
(31) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
(32) Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota;
(33) Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal);
(34) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah;
(35) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT);
(36) Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis;
(37) Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV);
(38) Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria;
(39) Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan tanpa rokok;
(40) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi;
(41) Sub Kegiatan Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak;
(42) Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Imunisasi;
(43) Sub Kegiatan Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik;
(44) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji.

3) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
(1) Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan;

4) Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
(1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C. D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya;
(2) Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
(3) Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan;
(4) Sub Kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan untuk peningkatan rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi, dengan fokus kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

1) Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
   (1) Sub Kegiatan Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan;
   (2) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan.

2) Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
   (1) Sub Kegiatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
   (2) Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar;
   (3) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

3) Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   (1) Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada peningkatan capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah; dan persentase sarana industri rumah tangga pangan (IRTP) yang memenuhi ketentuan, dengan fokus kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Pemberian Izin Apotek. Toko Obat. Toko Alat Kesehatan dan Optikal. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
   (1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek. Toko Obat. Toko Alat Kesehatan. dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).

2) Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi. untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
   (1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi. untuk Produk Makanan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.

3) Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
   (1) Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan untuk peningkatan proporsi penduduk dengan aktifitas fisik cukup, dengan fokus kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   (1) Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat.
2) Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   (1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat.
3) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   (1) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program ini diarahkan untuk peningkatan indeks kepuasan masyarakat; dan nilai Sakip perangkat daerah, dengan fokus kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Perencanaan. Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   (1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
   (2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
   (3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;

https://jdih.pemalangkab.go.id

(4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
(5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
(6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
(7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
(1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
(2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
(3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
(4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD;

3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
(1) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
(1) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
(2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
(1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
(2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
(3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
(4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
(5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
(6) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu;
(7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
(8) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
(9) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
(1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

https://jdih.pemalangkab.go.id

(2) Pengadaan Mebel;
(3) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
(4) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
(5) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
(6) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
(1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
(2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik;
(3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
(1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
(2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
(3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel;
(4) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
(5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
(6) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Rincian perumusan dan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan rencana strategis beserta indikator kinerja berikut target dan pagu pendanaan indikatif yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
					(3)	*(2)*	*(16)*
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				Usia Harapan Hidup		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat			Jumlah Kematian Ibu		
					Jumlah Kematian Balita		
					Prevalensi Stunting		
					Angka Populasi Bebas Penyakit Menular		
					Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular		
					Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai Standar		
			Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
					Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap		
					Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		
					Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis		
					Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar		
					Persentase Orang dengan HIV mendapat Pengobatan Antiretroviral (ARV)		
					Indeks SPM Kesehatan Keluarga		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
					(3)	*(2)*	*(16)*
					Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat		
					Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna		
					Persentase Faslitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan sesuai Standar		
					Net Death Rate (NDR) RSUD		
					Bed Occupation Rate (BOR) RSUD		
				Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	**Persentase puskesmas dengan pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar**	**1.02.02.2.01 Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	
					Proporsi puskesmas dengan Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan sesuai Standar		
					Persentase RSUD dengan pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar		
					Proporsi RSUD dengan Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan sesuai Standar		
				Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	
				Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas	
				Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
				Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
					(3)	*(2)*	*(16)*
				Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
				Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	
				Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
				Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
				Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
				Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/ Regional Maintainance Center	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/ Regional Maintainance Center	1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	
				Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
				Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
					(3)	*(2)*	*(16)*
				Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
				Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	
				Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	**Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil**	**1.02.02.2.02 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		
					Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		
					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
					Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		
					Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		
					Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
					Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
					(3)	*(2)*	*(16)*
					Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		
					Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		
					Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan (per - 1000 Penduduk)		
					Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi		
					Prevalensi Depresi pada Usia ≥15 Tahun		
					Prevalensi Obesitas > 18 Tahun		
					Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat		
					Persentase Lanjut Usia yang Mandiri		
					Persentase Merokok Penduduk 10-21 Tahun		
					Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis		
					Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan RSUD		
					Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Labkesda		
					Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas		
					Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Puskesmas		
				Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
					(3)	*(2)*	*(16)*
				Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
				Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
				Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
				Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
				Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
					(3)	*(2)*	*(16)*
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
				Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	
				Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	
				Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	
				Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
					(3)	*(2)*	*(16)*
				Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
				Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	1.02.02.2.02.0027 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	
				Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan	1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	
				Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	
				Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
				Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	
				Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
				Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	
				Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	
				Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
					(3)	*(2)*	*(16)*
				Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	
				Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	
				Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
				Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	1.02.02.2.02.0043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	
				Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
				Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
				Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	
				Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	
				Terlaksananya Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02.0049 Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1.02.02.2.02.0050 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	
				Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan yang Terintegrasi	**Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional**	**1.02.02.2.03 Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	
				Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
				Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah	**Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan**	**1.02.02.2.04 Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
					(3)	*(2)*	*(16)*
				Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	
				Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
				Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	
			Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		**Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi**	**1.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	
				Terlaksananya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan	**Persentase Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis yang memiliki Izin Praktik Tenaga Kesehatan**	**1.02.03.2.01 Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota**	
				Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
				Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM	**Persentase Puskesmas dengan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar** **Persentase Rumah Sakit Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai Standar**	**1.02.03.2.02 Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
					(3)	*(2)*	*(16)*
				Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	**Persentase SDM Kesehatan yang berhasil meningkatkan mutu dan kompetesi**	**1.02.03.2.03 Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		**Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari Lintas Sektor yang ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah**	**1.02.04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	
					Persentase Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang Memenuhi Ketentuan		
				Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	**Persentase Apotek dan Toko Obat yang Mampu Memelihara Persyaratan Perizinan**	**1.02.04.2.01 Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	
				Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
				Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	**Persentase Penerbitan dan Pemenuhan Komitmen SPP-IRT sesuai Standar**	**1.02.04.2.03 Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
					(3)	*(2)*	*(16)*
				Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
				Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu**	**1.02.04.2.06 Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	
				Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		**Proporsi Penduduk dengan Aktifitas Fisik Cukup**	**1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	
				Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah	**Persentase Desa/Kelurahan yang Memanfaatkan Dana Desa untuk Kesehatan**	**1.02.05.2.01 Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	
				Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
				Terselenggaranya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah	**Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (Strata Utama dan Paripurna)**	**1.02.05.2.02 Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
				Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
					(3)	*(2)*	*(16)*
				Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	**Persentase Posyandu Aktif**	**1.02.05.2.03 Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			**Indeks Kepuasan Masyarakat**		
					Nilai Sakip Perangkat Daerah		
			Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Perangkat Daerah		**Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai Regulasi**	**1.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	
					Persentase Capaian Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terpenuhi		
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi**	**1.02.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
					(3)	*(2)*	*(16)*
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi**	**1.02.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi**	**1.02.01.2.03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi**	**1.02.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
					(3)	*(2)*	*(16)*
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi**	**1.02.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**	**1.02.01.2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
					(3)	*(2)*	*(16)*
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.02.01.2.08** **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	**1.02.01.2.09** **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
					(3)	*(2)*	*(16)*
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						458.423.483.897		362.439.428.200		362.439.428.200		422.439.428.200		442.439.428.200	
DINAS KESEHATAN						262.360.980.997		206.376.925.300		206.376.925.300		226.376.925.300		226.376.925.300	
I	Tujuan : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,23	74,75		75,00		75,25		75,50		75,75		IUP, RIBK
A	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kematian Ibu	Kasus	10	10		10		10		9		9		RIBK
		Jumlah Kematian Balita	Kasus	123	118		116		114		112		110		RIBK
		Prevalensi Stunting	%	19,10	18,75		18,50		18,25		18,00		17,75		IUP, RIBK
		Angka Populasi Bebas Penyakit Menular	%	0	32		40		48		56		64		
		Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular	%	0	64		68		72		76		80		
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	%	0	59,5		59,5		68,5		68,5		77,5		RIBK
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					130.473.065.697		74.489.010.000		74.489.010.000		94.489.010.000		94.489.010.000	
		Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	0	40		50		60		70		80		RIBK
		Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	98,1	98		98		99		99		99		RIBK
		Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	75,07	74		74,5		75		75,5		76		RIBK

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
		Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	**%**	**90,77**	**93**		**94**		**95**		**96**		**97**		**IUP, RIBK**
		Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	**%**	**98,3**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**RIBK, SPM**
		Persentase Orang dengan HIV mendapat Pengobatan Antiretroviral (ARV)	**%**	**0**	**70**		**75**		**80**		**85**		**90**		
		Indeks SPM Kesehatan Keluarga	**Indeks**	**99,33**	**99,45**		**99,50**		**99,55**		**99,60**		**99,60**		**SPM**
		Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	**%**	**53,8**	**59**		**61**		**64**		**66**		**68**		**RIBK**
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna	**%**	**70**	**70**		**70**		**75**		**75**		**80**		**RIBK**
		Persentase Faslitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan sesuai Standar	**%**	**83**	**86**		**89**		**92**		**95**		**96**		**RIBK**
2.01	**Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**					**52.431.394.000**		**16.431.394.000**		**16.431.394.000**		**16.431.394.000**		**16.431.394.000**	
		Persentase puskesmas dengan pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	**%**	**88**	**90**		**95**		**95**		**100**		**100**		
		Proporsi puskesmas dengan Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan sesuai Standar	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1	1	40.000.000.000	1	0	1	0	1	0	1	0	
0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	0	0	-	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	
0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	1	0	0	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	
0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	16	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	
0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	89	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	
0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Unit	0	10	70.000.000	10	70.000.000	10	70.000.000	10	70.000.000	10	70.000.000	
0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	0	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	
0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	80	70	9.874.394.000	70	9.874.394.000	70	9.874.394.000	70	9.874.394.000	70	9.874.394.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Paket	150	150	117.000.000	150	117.000.000	150	117.000.000	150	117.000.000	150	117.000.000	
2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**77.437.166.897**		**57.453.111.200**		**57.453.111.200**		**77.453.111.200**		**77.453.111.200**	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	**%**	**99,9**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**SPM, IKK**
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	**%**	**96,2**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**SPM, IKK**
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**SPM, IKK**
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**SPM, IKK**
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**SPM, IKK**
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	**%**	**98,2**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**SPM, IKK**
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	**%**	**99,8**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**SPM, IKK**
		Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**%**	**98,3**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**SPM, IKK**
		Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**SPM, IKK**
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**SPM, IKK**

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	**%**	**94,6**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**SPM, IKK**
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	**%**	**86,6**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**SPM, IKK**
		Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan (per - 1000 Penduduk)	**Rasio**	**0,73**	**0,73**		**0,74**		**0,74**		**0,75**		**0,75**		**IKK**
		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**IKK**
		Prevalensi Depresi pada Usia ≥15 Tahun	**%**	**0**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		**RIBK**
		Prevalensi Obesitas > 18 Tahun	**%**	**0**	**25**		**24,5**		**24**		**23,5**		**23**		**RIBK**
		Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat	**%**	**17,14**	**20**		**23**		**26**		**29**		**32**		**RIBK**
		Persentase Lanjut Usia yang Mandiri	**%**	**66**	**68**		**69**		**70**		**71**		**72**		**RIBK**
		Persentase Merokok Penduduk 10-21 Tahun	**%**	**15,3**	**15**		**14,5**		**14**		**13,5**		**13**		**RIBK**
		Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis	**%**	**76,5**	**83**		**86**		**89**		**92**		**95**		**IUP, RIBK**
0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	21757	21654	80.000.000	21654	80.000.000	21654	80.000.000	21654	80.000.000	21654	80.000.000	
0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	20768	20669	60.000.000	20669	60.000.000	20669	60.000.000	20669	60.000.000	20669	60.000.000	
0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	19779	19685	100.000.000	19685	100.000.000	19685	100.000.000	19685	100.000.000	19685	100.000.000	
0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	96539	96189	110.000.000	96189	110.000.000	96189	110.000.000	96189	110.000.000	96189	110.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	196463	193587	70.000.000	193587	70.000.000	193587	70.000.000	193587	70.000.000	193587	70.000.000	
0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	805881	804093	580.258.020	804093	580.258.020	804093	580.258.020	804093	580.258.020	804093	580.258.020	
0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	185231	190516	85.161.880	190516	85.161.880	190516	85.161.880	190516	85.161.880	190516	85.161.880	
0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	138359	138847	150.000.000	138847	150.000.000	138847	150.000.000	138847	150.000.000	138847	150.000.000	
0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	18633	18699	191.478.180	18699	191.478.180	18699	191.478.180	18699	191.478.180	18699	191.478.180	
0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	1158	1159	150.000.000	1159	150.000.000	1159	150.000.000	1159	150.000.000	1159	150.000.000	
0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	15958	15960	1.498.065.100	15960	1.498.065.100	15960	1.498.065.100	15960	1.498.065.100	15960	1.498.065.100	
0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	33333	33403	364.274.000	33403	364.274.000	33403	364.274.000	33403	364.274.000	33403	364.274.000	
0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	1	1	218.562.000	1	218.562.000	1	218.562.000	1	218.562.000	1	218.562.000	
0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	1	1	236.451.500	1	236.451.500	1	236.451.500	1	236.451.500	1	236.451.500	
0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	470.000.000	1	470.000.000	1	470.000.000	1	470.000.000	1	470.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1	100.120.000	1	100.120.000	1	100.120.000	1	100.120.000	1	100.120.000	
0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	370.669.500	1	370.669.500	1	370.669.500	1	370.669.500	1	370.669.500	
0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1	811.448.000	1	811.448.000	1	811.448.000	1	811.448.000	1	811.448.000	
0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	1	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	
0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1	573.340.000	1	573.340.000	1	573.340.000	1	573.340.000	1	573.340.000	
0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	100	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	
0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	4	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dokumen	1	1	69.720.500	1	69.720.500	1	69.720.500	1	69.720.500	1	69.720.500	
0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1	535.000.000	1	535.000.000	1	535.000.000	1	535.000.000	1	535.000.000	
0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	1	68.624.470.317	1	48.640.414.620	1	48.640.414.620	1	68.640.414.620	1	68.640.414.620	
0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Orang	100	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	30	30	108.686.000	30	108.686.000	30	108.686.000	30	108.686.000	30	108.686.000	
0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	Dokumen	1	1	167.000.000	1	167.000.000	1	167.000.000	1	167.000.000	1	167.000.000	
0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1	1	25.929.000	1	25.929.000	1	25.929.000	1	25.929.000	1	25.929.000	
0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	37	69	107.045.000	69	107.045.000	69	107.045.000	69	107.045.000	69	107.045.000	
0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	1	13.723.000	1	13.723.000	1	13.723.000	1	13.723.000	1	13.723.000	
0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	1	1	14.300.000	1	14.300.000	1	14.300.000	1	14.300.000	1	14.300.000	
0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	
0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	4308	4308	127.210.900	4308	127.210.900	4308	127.210.900	4308	127.210.900	4308	127.210.900	
0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	100	100	149.490.000	100	149.490.000	100	149.490.000	100	149.490.000	100	149.490.000	
0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	3	3	30.960.000	3	30.960.000	3	30.960.000	3	30.960.000	3	30.960.000	
0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	Tatanan	-	3	20.000.000	4	20.000.000	5	20.000.000	6	20.000.000	7	20.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	-	1	868.804.000	1	868.804.000	1	868.804.000	1	868.804.000	1	868.804.000	
0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dokumen	-	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dokumen	-	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
2.03	**Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**					**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**	
		Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	**%**	**30**	**61**		**64**		**66**		**68**		**70**		**RIBK**
0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
2.04	**Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**504.504.800**		**504.504.800**		**504.504.800**		**504.504.800**		**504.504.800**	
		Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan	**%**	**0**	**65**		**70**		**75**		**80**		**80**		**RIBK**
0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	10	69	24.999.800	69	24.999.800	69	24.999.800	69	24.999.800	69	24.999.800	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit	33	69	25.000.000	69	25.000.000	69	25.000.000	69	25.000.000	69	25.000.000	
0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	68	69	54.505.000	69	54.505.000	69	54.505.000	69	54.505.000	69	54.505.000	
0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	1	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	
1.02.03	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**					**1.763.673.250**		**1.763.673.250**		**1.763.673.250**		**1.763.673.250**		**1.763.673.250**	
		Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi	**Per-1.000 Penduduk**	**0**	**1,77**		**1,81**		**1,85**		**1,89**		**1,93**		**RIBK**
2.01	**Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota**					**120.000.000**		**120.000.000**		**120.000.000**		**120.000.000**		**120.000.000**	
		Persentase Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis yang memiliki Izin Praktik Tenaga Kesehatan	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
2.02	**Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**					**86.250.000**		**86.250.000**		**86.250.000**		**86.250.000**		**86.250.000**	
		Persentase Puskesmas dengan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	**%**	**48**	**52**		**56**		**60**		**64**		**68**		**RIBK**
		Persentase Rumah Sakit Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai Standar	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**RIBK**

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	
0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	50	200	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	
0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	1	16.250.000	1	16.250.000	1	16.250.000	1	16.250.000	1	16.250.000	
2.03	**Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**1.557.423.250**		**1.557.423.250**		**1.557.423.250**		**1.557.423.250**		**1.557.423.250**	
		Persentase SDM Kesehatan yang berhasil meningkatkan mutu dan kompetesi	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	100	200	1.557.423.250	200	1.557.423.250	200	1.557.423.250	200	1.557.423.250	200	1.557.423.250	
1.02.04	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**					**507.091.000**		**507.091.000**		**507.091.000**		**507.091.000**		**507.091.000**	
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari Lintas Sektor yang ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**RIBK**
		Persentase Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang Memenuhi Ketentuan	**%**	**65**	**69**		**71**		**73**		**75**		**75**		**RIBK**
2.01	**Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**					**110.080.800**		**110.080.800**		**110.080.800**		**110.080.800**		**110.080.800**	
		Persentase Apotek dan Toko Obat yang Mampu Memelihara Persyaratan Perizinan	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**RIBK**

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0001	1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	1	1	110.080.800	1	110.080.800	1	110.080.800	1	110.080.800	1	110.080.800	
2.03	**Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**					**155.148.500**		**155.148.500**		**155.148.500**		**155.148.500**		**155.148.500**	
		Persentase Penerbitan dan Pemenuhan Komitmen SPP-IRT sesuai Standar	**%**	**66**	**67**		**68**		**69**		**70**		**70**		**RIBK**
0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	1	1	155.148.500	1	155.148.500	1	155.148.500	1	155.148.500	1	155.148.500	
2.06	**Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**					**241.861.700**		**241.861.700**		**241.861.700**		**241.861.700**		**241.861.700**	
		Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu	**%**	**76**	**77**		**78**		**79**		**80**		**80**		**RIBK**

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	12	12	241.861.700	12	241.861.700	12	241.861.700	12	241.861.700	12	241.861.700	
1.02.05	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**					**391.995.050**		**391.995.050**		**391.995.050**		**391.995.050**		**391.995.050**	
		Proporsi Penduduk dengan Aktifitas Fisik Cukup	**%**	**0**	**50**		**75**		**100**		**100**		**100**		**RIBK**
2.01	**Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**56.584.500**		**56.584.500**		**56.584.500**		**56.584.500**		**56.584.500**	
		Persentase Desa/Kelurahan yang Memanfaatkan Dana Desa untuk Kesehatan	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	1	1	56.584.500	1	56.584.500	1	56.584.500	1	56.584.500	1	56.584.500	
2.02	**Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**110.790.000**		**110.790.000**		**110.790.000**		**110.790.000**		**110.790.000**	
		Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (Strata Utama dan Paripurna)	**%**	**89,14**	**89,25**		**89,3**		**89,35**		**89,4**		**89,45**		
0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	1	1	110.790.000	1	110.790.000	1	110.790.000	1	110.790.000	1	110.790.000	
2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**224.620.550**		**224.620.550**		**224.620.550**		**224.620.550**		**224.620.550**	
		Persentase Posyandu Aktif	**%**	**49,27**	**52**		**54**		**56**		**58**		**60**		

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	1	1	224.620.550	1	224.620.550	1	224.620.550	1	224.620.550	1	224.620.550	
B	**Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Indeks**	**89,09**	**89,2**		**89,3**		**89,4**		**89,5**		**89,5**		
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	**Nilai**	**63,61**	**66**		**67**		**68**		**69**		**70**		
1.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**					**129.225.156.000**		**129.225.156.000**		**129.225.156.000**		**129.225.156.000**		**129.225.156.000**	
		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai Regulasi	**%**	**0**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
		Persentase Capaian Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terpenuhi	**%**	**0**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					**265.000.000**		**265.000.000**		**265.000.000**		**265.000.000**		**265.000.000**	
		Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	3	50.000.000	
0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	45.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	
0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	2	45.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	
0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	2	45.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	
0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	
0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	
2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**126.357.656.000**		**126.357.656.000**		**126.357.656.000**		**126.357.656.000**		**126.357.656.000**	
		Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1552	1530	126.220.156.000	1530	126.220.156.000	1530	126.220.156.000	1530	126.220.156.000	1530	126.220.156.000	
0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	
0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	18	18	12.500.000	18	12.500.000	18	12.500.000	18	12.500.000	18	12.500.000	
2.03	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**					**32.400.000**		**32.400.000**		**32.400.000**		**32.400.000**		**32.400.000**	
		Persentase Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	32.400.000	1	32.400.000	1	32.400.000	1	32.400.000	1	32.400.000	
2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					**40.940.000**		**40.940.000**		**40.940.000**		**40.940.000**		**40.940.000**	
		Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	20.940.000	1	20.940.000	1	20.940.000	1	20.940.000	1	20.940.000	
0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	60	20.000.000	60	20.000.000	60	20.000.000	60	20.000.000	60	20.000.000	
2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**416.690.000**		**416.690.000**		**416.690.000**		**416.690.000**		**416.690.000**	
		Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	1	29.000.000	1	29.000.000	1	29.000.000	1	29.000.000	1	29.000.000	
0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	
0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	143.690.000	4	143.690.000	4	143.690.000	4	143.690.000	4	143.690.000	
0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	47.000.000	2	47.000.000	2	47.000.000	2	47.000.000	2	47.000.000	
0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	140.000.000	1	140.000.000	1	140.000.000	1	140.000.000	1	140.000.000	
0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**124.010.000**		**318.480.000**		**318.480.000**		**318.480.000**		**124.010.000**	
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	0	0	1	194.470.000	0	0	1	194.470.000	0	0	
0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	10	30.500.000	10	30.500.000	10	30.500.000	10	30.500.000	10	30.500.000	
0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	10	93.510.000	10	93.510.000	10	93.510.000	10	93.510.000	10	93.510.000	
0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	0	0	0	0	1	194.470.000	0	0	0	0	
2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**1.503.790.000**		**1.503.790.000**		**1.503.790.000**		**1.503.790.000**		**1.503.790.000**	
		Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	
0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	720.000.000	1	720.000.000	1	720.000.000	1	720.000.000	1	720.000.000	
0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	776.790.000	1	776.790.000	1	776.790.000	1	776.790.000	1	776.790.000	
2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**484.670.000**		**290.200.000**		**290.200.000**		**290.200.000**		**484.670.000**	
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	7	7	79.160.000	7	79.160.000	7	79.160.000	7	79.160.000	7	79.160.000	
0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14	14	143.360.000	14	143.360.000	14	143.360.000	14	143.360.000	14	143.360.000	
0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	
0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	65	55.680.000	65	55.680.000	65	55.680.000	65	55.680.000	65	55.680.000	
0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	194.470.000	0	0	0	0	0	0	1	194.470.000	
00010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	2	7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
RSUD dr. M. ASHARI						**101.000.000.000**		**61.000.000.000**		**61.000.000.000**		**101.000.000.000**		**121.000.000.000**	
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**					**101.000.000.000**		**61.000.000.000**		**61.000.000.000**		**101.000.000.000**		**121.000.000.000**	
		Net Death Rate (NDR) RSUD	**Permil**	**20,2**	**20,2**		**20**		**20**		**20**		**20**		
		Bed Occupation Rate (BOR) RSUD	**%**	**81,7**	**83,5**		**84**		**84,5**		**85**		**85**		
2.01	**Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**					**21.000.000.000**		**1.000.000.000**		**1.000.000.000**		**21.000.000.000**		**41.000.000.000**	
		Persentase RSUD dengan pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	**%**	**72,78**	**75**		**80**		**85**		**90**		**100**		
		Proporsi RSUD dengan Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan sesuai Standar	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Unit	-	1	20.000.000.000	1	0	1	0	0	0	1	0	
0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	1	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	
0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	-	0	0	0	0	0	0	1	20.000.000.000	1	40.000.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	5	25	500.000.000	25	500.000.000	25	500.000.000	25	500.000.000	25	500.000.000	
2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**80.000.000.000**		**60.000.000.000**		**60.000.000.000**		**80.000.000.000**		**80.000.000.000**	
		Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan RSUD	**%**	**88,2**	**88,3**		**88,35**		**88,4**		**88,45**		**88,5**		
0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	1	1	80.000.000.000	1	60.000.000.000	1	60.000.000.000	1	80.000.000.000	1	80.000.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
PUSKESMAS BANYUMUDAL						**4.345.221.000**		**4.345.221.000**		**4.345.221.000**		**4.345.221.000**		**4.345.221.000**	
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**					**4.345.221.000**		**4.345.221.000**		**4.345.221.000**		**4.345.221.000**		**4.345.221.000**	
2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**4.345.221.000**		**4.345.221.000**		**4.345.221.000**		**4.345.221.000**		**4.345.221.000**	
		Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas	**Indeks**	**0**	**95**		**96**		**97**		**98**		**99**		
		Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas	**%**	**0**	**65**		**70**		**75**		**80**		**80**		
0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1077	1072	60.000.000	1072	60.000.000	1072	60.000.000	1072	60.000.000	1072	60.000.000	
0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1028	1023	10.000.000	1023	10.000.000	1023	10.000.000	1023	10.000.000	1023	10.000.000	
0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	979	974	10.000.000	974	10.000.000	974	10.000.000	974	10.000.000	974	10.000.000	
0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4777	4760	10.000.000	4760	10.000.000	4760	10.000.000	4760	10.000.000	4760	10.000.000	
0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	9722	9579	30.000.000	9579	30.000.000	9579	30.000.000	9579	30.000.000	9579	30.000.000	
0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	39881	39791	10.000.000	39791	10.000.000	39791	10.000.000	39791	10.000.000	39791	10.000.000	
0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	9167	9428	10.000.000	9428	10.000.000	9428	10.000.000	9428	10.000.000	9428	10.000.000	
0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6847	6871	10.000.000	6871	10.000.000	6871	10.000.000	6871	10.000.000	6871	10.000.000	
0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	922	925	10.000.000	925	10.000.000	925	10.000.000	925	10.000.000	925	10.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	57	57	8.000.000	57	8.000.000	57	8.000.000	57	8.000.000	57	8.000.000	
0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	790	790	15.000.000	790	15.000.000	790	15.000.000	790	15.000.000	790	15.000.000	
0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	2090	2090	5.000.000	2090	5.000.000	2090	5.000.000	2090	5.000.000	2090	5.000.000	
0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	10	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	
0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	3.887.721.000	1	3.887.721.000	1	3.887.721.000	1	3.887.721.000	1	3.887.721.000	
0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	54	54	5.000.000	54	5.000.000	54	5.000.000	54	5.000.000	54	5.000.000	
0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	3	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
PUSKESMAS WARUNGPRING						**2.674.980.000**		**2.674.980.000**		**2.674.980.000**		**2.674.980.000**		**2.674.980.000**	
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**					**2.674.980.000**		**2.674.980.000**		**2.674.980.000**		**2.674.980.000**		**2.674.980.000**	
2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**2.674.980.000**		**2.674.980.000**		**2.674.980.000**		**2.674.980.000**		**2.674.980.000**	
		Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas	**Indeks**	**0**	**95**		**96**		**97**		**98**		**99**		
		Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas	**%**	**0**	**65**		**70**		**75**		**80**		**80**		
0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	654	651	60.000.000	651	60.000.000	651	60.000.000	651	60.000.000	651	60.000.000	
0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	624	621	10.000.000	621	10.000.000	621	10.000.000	621	10.000.000	621	10.000.000	
0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	594	591	10.000.000	591	10.000.000	591	10.000.000	591	10.000.000	591	10.000.000	
0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2901	2890	10.000.000	2890	10.000.000	2890	10.000.000	2890	10.000.000	2890	10.000.000	
0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5903	5817	30.000.000	5817	30.000.000	5817	30.000.000	5817	30.000.000	5817	30.000.000	
0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	24213	24160	10.000.000	24160	10.000.000	24160	10.000.000	24160	10.000.000	24160	10.000.000	
0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5565	5724	10.000.000	5724	10.000.000	5724	10.000.000	5724	10.000.000	5724	10.000.000	
0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4157	4172	10.000.000	4172	10.000.000	4172	10.000.000	4172	10.000.000	4172	10.000.000	
0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	560	562	10.000.000	562	10.000.000	562	10.000.000	562	10.000.000	562	10.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	35	35	8.000.000	35	8.000.000	35	8.000.000	35	8.000.000	35	8.000.000	
0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	479	480	20.000.000	480	20.000.000	480	20.000.000	480	20.000.000	480	20.000.000	
0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	930	1000	5.000.000	1000	5.000.000	1000	5.000.000	1000	5.000.000	1000	5.000.000	
0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	10	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	
0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	2.229.980.000	1	2.229.980.000	1	2.229.980.000	1	2.229.980.000	1	2.229.980.000	
0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	37	37	5.000.000	37	5.000.000	37	5.000.000	37	5.000.000	37	5.000.000	
0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	3	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
PUSKESMAS PULOSARI						**4.228.905.900**		**4.228.905.900**		**4.228.905.900**		**4.228.905.900**		**4.228.905.900**	
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**					**4.228.905.900**		**4.228.905.900**		**4.228.905.900**		**4.228.905.900**		**4.228.905.900**	
2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**4.228.905.900**		**4.228.905.900**		**4.228.905.900**		**4.228.905.900**		**4.228.905.900**	
		Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas	**Indeks**	**0**	**95**		**96**		**97**		**98**		**99**		
		Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas	**%**	**0**	**65**		**70**		**75**		**80**		**80**		
0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	937	933	60.000.000	933	60.000.000	933	60.000.000	933	60.000.000	933	60.000.000	
0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	895	890	10.000.000	890	10.000.000	890	10.000.000	890	10.000.000	890	10.000.000	
0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	852	848	10.000.000	848	10.000.000	848	10.000.000	848	10.000.000	848	10.000.000	
0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4158	4143	10.000.000	4143	10.000.000	4143	10.000.000	4143	10.000.000	4143	10.000.000	
0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	8462	8339	20.000.000	8339	20.000.000	8339	20.000.000	8339	20.000.000	8339	20.000.000	
0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	34713	34638	10.000.000	34638	10.000.000	34638	10.000.000	34638	10.000.000	34638	10.000.000	
0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7979	8207	10.000.000	8207	10.000.000	8207	10.000.000	8207	10.000.000	8207	10.000.000	
0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5960	5981	10.000.000	5981	10.000.000	5981	10.000.000	5981	10.000.000	5981	10.000.000	
0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	803	806	10.000.000	806	10.000.000	806	10.000.000	806	10.000.000	806	10.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	50	50	8.000.000	50	8.000.000	50	8.000.000	50	8.000.000	50	8.000.000	
0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	687	687	15.000.000	687	15.000.000	687	15.000.000	687	15.000.000	687	15.000.000	
0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	1234	1234	5.000.000	1234	5.000.000	1234	5.000.000	1234	5.000.000	1234	5.000.000	
0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	10	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	
0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	3.723.405.900	1	3.723.405.900	1	3.723.405.900	1	3.723.405.900	1	3.723.405.900	
0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	13	13	5.000.000	13	5.000.000	13	5.000.000	13	5.000.000	13	5.000.000	
0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	3	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	
0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
PUSKESMAS BELIK						**6.698.019.000**		**6.698.019.000**		**6.698.019.000**		**6.698.019.000**		**6.698.019.000**	
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**					**6.698.019.000**		**6.698.019.000**		**6.698.019.000**		**6.698.019.000**		**6.698.019.000**	
2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**6.698.019.000**		**6.698.019.000**		**6.698.019.000**		**6.698.019.000**		**6.698.019.000**	
		Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas	**Indeks**	**0**	**95**		**96**		**97**		**98**		**99**		
		Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas	**%**	**0**	**65**		**70**		**75**		**80**		**80**		
0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1766	1758	60.000.000	1758	60.000.000	1758	60.000.000	1758	60.000.000	1758	60.000.000	
0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1686	1678	10.000.000	1678	10.000.000	1678	10.000.000	1678	10.000.000	1678	10.000.000	
0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1606	1598	10.000.000	1598	10.000.000	1598	10.000.000	1598	10.000.000	1598	10.000.000	
0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7837	7808	10.000.000	7808	10.000.000	7808	10.000.000	7808	10.000.000	7808	10.000.000	
0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	15949	15715	30.000.000	15715	30.000.000	15715	30.000.000	15715	30.000.000	15715	30.000.000	
0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	65419	65274	10.000.000	65274	10.000.000	65274	10.000.000	65274	10.000.000	65274	10.000.000	
0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	15037	15466	10.000.000	15466	10.000.000	15466	10.000.000	15466	10.000.000	15466	10.000.000	
0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	11232	11271	10.000.000	11271	10.000.000	11271	10.000.000	11271	10.000.000	11271	10.000.000	
0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1513	1518	10.000.000	1518	10.000.000	1518	10.000.000	1518	10.000.000	1518	10.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	94	94	8.000.000	94	8.000.000	94	8.000.000	94	8.000.000	94	8.000.000	
0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	1295	1296	15.000.000	1296	15.000.000	1296	15.000.000	1296	15.000.000	1296	15.000.000	
0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	2343	2343	5.000.000	2343	5.000.000	2343	5.000.000	2343	5.000.000	2343	5.000.000	
0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	10	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	
0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	6.234.519.000	1	6.234.519.000	1	6.234.519.000	1	6.234.519.000	1	6.234.519.000	
0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	68	68	8.000.000	68	8.000.000	68	8.000.000	68	8.000.000	68	8.000.000	
0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	3	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
PUSKESMAS WATUKUMPUL						**3.291.558.000**		**3.291.558.000**		**3.291.558.000**		**3.291.558.000**		**3.291.558.000**	
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**					**3.291.558.000**		**3.291.558.000**		**3.291.558.000**		**3.291.558.000**		**3.291.558.000**	
2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**3.291.558.000**		**3.291.558.000**		**3.291.558.000**		**3.291.558.000**		**3.291.558.000**	
		Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas	**Indeks**	**0**	**95**		**96**		**97**		**98**		**99**		
		Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas	**%**	**0**	**65**		**70**		**75**		**80**		**80**		
0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	495	492	60.000.000	492	60.000.000	492	60.000.000	492	60.000.000	492	60.000.000	
0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	472	470	10.000.000	470	10.000.000	470	10.000.000	470	10.000.000	470	10.000.000	
0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	450	448	10.000.000	448	10.000.000	448	10.000.000	448	10.000.000	448	10.000.000	
0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2196	2188	10.000.000	2188	10.000.000	2188	10.000.000	2188	10.000.000	2188	10.000.000	
0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4468	4402	30.000.000	4402	30.000.000	4402	30.000.000	4402	30.000.000	4402	30.000.000	
0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	18330	18288	10.000.000	18288	10.000.000	18288	10.000.000	18288	10.000.000	18288	10.000.000	
0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4213	4334	10.000.000	4334	10.000.000	4334	10.000.000	4334	10.000.000	4334	10.000.000	
0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3147	3158	10.000.000	3158	10.000.000	3158	10.000.000	3158	10.000.000	3158	10.000.000	
0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	424	425	10.000.000	425	10.000.000	425	10.000.000	425	10.000.000	425	10.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	26	26	8.000.000	26	8.000.000	26	8.000.000	26	8.000.000	26	8.000.000	
0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	363	363	15.000.000	363	15.000.000	363	15.000.000	363	15.000.000	363	15.000.000	
0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	904	904	5.000.000	904	5.000.000	904	5.000.000	904	5.000.000	904	5.000.000	
0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	10	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	
0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	
0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	2.854.058.000	1	2.854.058.000	1	2.854.058.000	1	2.854.058.000	1	2.854.058.000	
0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	19	19	5.000.000	19	5.000.000	19	5.000.000	19	5.000.000	19	5.000.000	
0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	3	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
PUSKESMAS CIKADU						**2.571.802.000**		**2.571.802.000**		**2.571.802.000**		**2.571.802.000**		**2.571.802.000**	
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**					**2.571.802.000**		**2.571.802.000**		**2.571.802.000**		**2.571.802.000**		**2.571.802.000**	
2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**2.571.802.000**		**2.571.802.000**		**2.571.802.000**		**2.571.802.000**		**2.571.802.000**	
		Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas	**Indeks**	**0**	**95**		**96**		**97**		**98**		**99**		
		Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas	**%**	**0**	**65**		**70**		**75**		**80**		**80**		
0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	602	599	60.000.000	599	60.000.000	599	60.000.000	599	60.000.000	599	60.000.000	
0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	574	572	10.000.000	572	10.000.000	572	10.000.000	572	10.000.000	572	10.000.000	
0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	547	545	10.000.000	545	10.000.000	545	10.000.000	545	10.000.000	545	10.000.000	
0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2671	2661	10.000.000	2661	10.000.000	2661	10.000.000	2661	10.000.000	2661	10.000.000	
0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5435	5356	20.000.000	5356	20.000.000	5356	20.000.000	5356	20.000.000	5356	20.000.000	
0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	22294	22245	10.000.000	22245	10.000.000	22245	10.000.000	22245	10.000.000	22245	10.000.000	
0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5124	5271	10.000.000	5271	10.000.000	5271	10.000.000	5271	10.000.000	5271	10.000.000	
0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3828	3841	10.000.000	3841	10.000.000	3841	10.000.000	3841	10.000.000	3841	10.000.000	
0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	515	517	10.000.000	517	10.000.000	517	10.000.000	517	10.000.000	517	10.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	32	32	8.000.000	32	8.000.000	32	8.000.000	32	8.000.000	32	8.000.000	
0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	441	441	15.000.000	441	15.000.000	441	15.000.000	441	15.000.000	441	15.000.000	
0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	821	821	5.000.000	821	5.000.000	821	5.000.000	821	5.000.000	821	5.000.000	
0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	10	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	
0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	
0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	2.164.302.000	1	2.164.302.000	1	2.164.302.000	1	2.164.302.000	1	2.164.302.000	
0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	17	17	5.000.000	17	5.000.000	17	5.000.000	17	5.000.000	17	5.000.000	
0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	3	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
PUSKESMAS KEBANDARAN						**3.483.844.000**		**3.483.844.000**		**3.483.844.000**		**3.483.844.000**		**3.483.844.000**	
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**					**3.483.844.000**		**3.483.844.000**		**3.483.844.000**		**3.483.844.000**		**3.483.844.000**	
2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**3.483.844.000**		**3.483.844.000**		**3.483.844.000**		**3.483.844.000**		**3.483.844.000**	
		Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas	**Indeks**	**0**	**95**		**96**		**97**		**98**		**99**		
		Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas	**%**	**0**	**65**		**70**		**75**		**80**		**80**		
0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	470	468	60.000.000	468	60.000.000	468	60.000.000	468	60.000.000	468	60.000.000	
0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	449	447	10.000.000	447	10.000.000	447	10.000.000	447	10.000.000	447	10.000.000	
0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	428	426	10.000.000	426	10.000.000	426	10.000.000	426	10.000.000	426	10.000.000	
0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2087	2080	10.000.000	2080	10.000.000	2080	10.000.000	2080	10.000.000	2080	10.000.000	
0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4247	4185	20.000.000	4185	20.000.000	4185	20.000.000	4185	20.000.000	4185	20.000.000	
0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	17420	17382	10.000.000	17382	10.000.000	17382	10.000.000	17382	10.000.000	17382	10.000.000	
0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4004	4118	10.000.000	4118	10.000.000	4118	10.000.000	4118	10.000.000	4118	10.000.000	
0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2991	3001	10.000.000	3001	10.000.000	3001	10.000.000	3001	10.000.000	3001	10.000.000	
0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	403	404	10.000.000	404	10.000.000	404	10.000.000	404	10.000.000	404	10.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	25	25	8.000.000	25	8.000.000	25	8.000.000	25	8.000.000	25	8.000.000	
0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	345	345	15.000.000	345	15.000.000	345	15.000.000	345	15.000.000	345	15.000.000	
0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	934	934	5.000.000	934	5.000.000	934	5.000.000	934	5.000.000	934	5.000.000	
0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	
0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	10	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	
0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	
0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	3.054.344.000	1	3.054.344.000	1	3.054.344.000	1	3.054.344.000	1	3.054.344.000	
0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	23	23	5.000.000	23	5.000.000	23	5.000.000	23	5.000.000	23	5.000.000	
0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	3	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
PUSKESMAS JATIROYOM						**2.434.189.000**		**2.434.189.000**		**2.434.189.000**		**2.434.189.000**		**2.434.189.000**	
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**					**2.434.189.000**		**2.434.189.000**		**2.434.189.000**		**2.434.189.000**		**2.434.189.000**	
2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**2.434.189.000**		**2.434.189.000**		**2.434.189.000**		**2.434.189.000**		**2.434.189.000**	
		Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas	**Indeks**	**0**	**95**		**96**		**97**		**98**		**99**		
		Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas	**%**	**0**	**65**		**70**		**75**		**80**		**80**		
0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	445	443	60.000.000	443	60.000.000	443	60.000.000	443	60.000.000	443	60.000.000	
0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	425	423	10.000.000	423	10.000.000	423	10.000.000	423	10.000.000	423	10.000.000	
0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	404	402	10.000.000	402	10.000.000	402	10.000.000	402	10.000.000	402	10.000.000	
0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1974	1967	10.000.000	1967	10.000.000	1967	10.000.000	1967	10.000.000	1967	10.000.000	
0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4017	3958	50.000.000	3958	50.000.000	3958	50.000.000	3958	50.000.000	3958	50.000.000	
0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	16475	16439	10.000.000	16439	10.000.000	16439	10.000.000	16439	10.000.000	16439	10.000.000	
0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3787	3895	10.000.000	3895	10.000.000	3895	10.000.000	3895	10.000.000	3895	10.000.000	
0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2829	2839	10.000.000	2839	10.000.000	2839	10.000.000	2839	10.000.000	2839	10.000.000	
0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	381	382	10.000.000	382	10.000.000	382	10.000.000	382	10.000.000	382	10.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	24	24	8.000.000	24	8.000.000	24	8.000.000	24	8.000.000	24	8.000.000	
0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	356	326	20.000.000	326	20.000.000	326	20.000.000	326	20.000.000	326	20.000.000	
0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	950	950	5.000.000	950	5.000.000	950	5.000.000	950	5.000.000	950	5.000.000	
0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	
0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	10	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	
0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	
0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	1.983.689.000	1	1.983.689.000	1	1.983.689.000	1	1.983.689.000	1	1.983.689.000	
0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	14	14	5.000.000	14	5.000.000	14	5.000.000	14	5.000.000	14	5.000.000	
0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	3	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
PUSKESMAS BANTARBOLANG						**5.505.773.000**		**5.505.773.000**		**5.505.773.000**		**5.505.773.000**		**5.505.773.000**	
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**					**5.505.773.000**		**5.505.773.000**		**5.505.773.000**		**5.505.773.000**		**5.505.773.000**	
2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**5.505.773.000**		**5.505.773.000**		**5.505.773.000**		**5.505.773.000**		**5.505.773.000**	
		Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas	**Indeks**	**0**	**95**		**96**		**97**		**98**		**99**		
		Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas	**%**	**0**	**65**		**70**		**75**		**80**		**80**		
0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1207	1201	80.000.000	1201	80.000.000	1201	80.000.000	1201	80.000.000	1201	80.000.000	
0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1152	1147	10.000.000	1147	10.000.000	1147	10.000.000	1147	10.000.000	1147	10.000.000	
0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1097	1092	10.000.000	1092	10.000.000	1092	10.000.000	1092	10.000.000	1092	10.000.000	
0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5355	5336	10.000.000	5336	10.000.000	5336	10.000.000	5336	10.000.000	5336	10.000.000	
0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	10897	10738	50.000.000	10738	50.000.000	10738	50.000.000	10738	50.000.000	10738	50.000.000	
0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	44701	44606	10.000.000	44606	10.000.000	44606	10.000.000	44606	10.000.000	44606	10.000.000	
0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	10274	10568	10.000.000	10568	10.000.000	10568	10.000.000	10568	10.000.000	10568	10.000.000	
0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7674	7702	10.000.000	7702	10.000.000	7702	10.000.000	7702	10.000.000	7702	10.000.000	
0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1034	1037	10.000.000	1037	10.000.000	1037	10.000.000	1037	10.000.000	1037	10.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	64	64	8.000.000	64	8.000.000	64	8.000.000	64	8.000.000	64	8.000.000	
0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	885	885	20.000.000	885	20.000.000	885	20.000.000	885	20.000.000	885	20.000.000	
0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	1687	1687	5.000.000	1687	5.000.000	1687	5.000.000	1687	5.000.000	1687	5.000.000	
0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	10	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	
0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	4.953.273.000	1	4.953.273.000	1	4.953.273.000	1	4.953.273.000	1	4.953.273.000	
0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	21	21	5.000.000	21	5.000.000	21	5.000.000	21	5.000.000	21	5.000.000	
0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	3	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
PUSKESMAS RANDUDONGKAL						**3.967.731.000**		**3.967.731.000**		**3.967.731.000**		**3.967.731.000**		**3.967.731.000**	
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**					**3.967.731.000**		**3.967.731.000**		**3.967.731.000**		**3.967.731.000**		**3.967.731.000**	
2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**3.967.731.000**		**3.967.731.000**		**3.967.731.000**		**3.967.731.000**		**3.967.731.000**	
		Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas	**Indeks**	**0**	**95**		**96**		**97**		**98**		**99**		
		Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas	**%**	**0**	**65**		**70**		**75**		**80**		**80**		
0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	894	890	100.000.000	890	100.000.000	890	100.000.000	890	100.000.000	890	100.000.000	
0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	853	849	10.000.000	849	10.000.000	849	10.000.000	849	10.000.000	849	10.000.000	
0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	813	809	10.000.000	809	10.000.000	809	10.000.000	809	10.000.000	809	10.000.000	
0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3967	3952	10.000.000	3952	10.000.000	3952	10.000.000	3952	10.000.000	3952	10.000.000	
0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	8072	7955	50.000.000	7955	50.000.000	7955	50.000.000	7955	50.000.000	7955	50.000.000	
0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	33112	33041	10.000.000	33041	10.000.000	33041	10.000.000	33041	10.000.000	33041	10.000.000	
0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7611	7828	10.000.000	7828	10.000.000	7828	10.000.000	7828	10.000.000	7828	10.000.000	
0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5685	5705	10.000.000	5705	10.000.000	5705	10.000.000	5705	10.000.000	5705	10.000.000	
0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	766	768	10.000.000	768	10.000.000	768	10.000.000	768	10.000.000	768	10.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	48	48	8.000.000	48	8.000.000	48	8.000.000	48	8.000.000	48	8.000.000	
0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	656	656	15.000.000	656	15.000.000	656	15.000.000	656	15.000.000	656	15.000.000	
0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	1313	1313	5.000.000	1313	5.000.000	1313	5.000.000	1313	5.000.000	1313	5.000.000	
0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	10	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	
0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	
0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	3.470.231.000	1	3.470.231.000	1	3.470.231.000	1	3.470.231.000	1	3.470.231.000	
0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	59	59	5.000.000	59	5.000.000	59	5.000.000	59	5.000.000	59	5.000.000	
0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	3	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
PUSKESMAS KALIMAS						**2.780.300.000**		**2.780.300.000**		**2.780.300.000**		**2.780.300.000**		**2.780.300.000**	
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**					**2.780.300.000**		**2.780.300.000**		**2.780.300.000**		**2.780.300.000**		**2.780.300.000**	
2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**2.780.300.000**		**2.780.300.000**		**2.780.300.000**		**2.780.300.000**		**2.780.300.000**	
		Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas	**Indeks**	**0**	**95**		**96**		**97**		**98**		**99**		
		Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas	**%**	**0**	**65**		**70**		**75**		**80**		**80**		
0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	741	737	50.000.000	737	50.000.000	737	50.000.000	737	50.000.000	737	50.000.000	
0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	707	704	10.000.000	704	10.000.000	704	10.000.000	704	10.000.000	704	10.000.000	
0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	673	670	10.000.000	670	10.000.000	670	10.000.000	670	10.000.000	670	10.000.000	
0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3287	3275	10.000.000	3275	10.000.000	3275	10.000.000	3275	10.000.000	3275	10.000.000	
0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6690	6592	25.000.000	6592	25.000.000	6592	25.000.000	6592	25.000.000	6592	25.000.000	
0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	27436	27380	10.000.000	27380	10.000.000	27380	10.000.000	27380	10.000.000	27380	10.000.000	
0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6306	6487	10.000.000	6487	10.000.000	6487	10.000.000	6487	10.000.000	6487	10.000.000	
0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4710	4728	10.000.000	4728	10.000.000	4728	10.000.000	4728	10.000.000	4728	10.000.000	
0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	634	637	10.000.000	637	10.000.000	637	10.000.000	637	10.000.000	637	10.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	39	39	8.000.000	39	8.000.000	39	8.000.000	39	8.000.000	39	8.000.000	
0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	543	543	15.000.000	543	15.000.000	543	15.000.000	543	15.000.000	543	15.000.000	
0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	1122	1122	5.000.000	1122	5.000.000	1122	5.000.000	1122	5.000.000	1122	5.000.000	
0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	10	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	
0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	
0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	2.244.800.000	1	2.244.800.000	1	2.244.800.000	1	2.244.800.000	1	2.244.800.000	
0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	46	46	5.000.000	46	5.000.000	46	5.000.000	46	5.000.000	46	5.000.000	
0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	3	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	
0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
PUSKESMAS PADURAKSA						**3.724.847.000**		**3.724.847.000**		**3.724.847.000**		**3.724.847.000**		**3.724.847.000**	
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**					**3.724.847.000**		**3.724.847.000**		**3.724.847.000**		**3.724.847.000**		**3.724.847.000**	
2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**3.724.847.000**		**3.724.847.000**		**3.724.847.000**		**3.724.847.000**		**3.724.847.000**	
		Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas	**Indeks**	**0**	**95**		**96**		**97**		**98**		**99**		
		Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas	**%**	**0**	**65**		**70**		**75**		**80**		**80**		
0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	800	796	50.000.000	796	50.000.000	796	50.000.000	796	50.000.000	796	50.000.000	
0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	764	760	10.000.000	760	10.000.000	760	10.000.000	760	10.000.000	760	10.000.000	
0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	727	724	10.000.000	724	10.000.000	724	10.000.000	724	10.000.000	724	10.000.000	
0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3550	3537	10.000.000	3537	10.000.000	3537	10.000.000	3537	10.000.000	3537	10.000.000	
0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7224	7117	40.000.000	7117	40.000.000	7117	40.000.000	7117	40.000.000	7117	40.000.000	
0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	29632	29564	10.000.000	29564	10.000.000	29564	10.000.000	29564	10.000.000	29564	10.000.000	
0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6811	7005	10.000.000	7005	10.000.000	7005	10.000.000	7005	10.000.000	7005	10.000.000	
0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5087	5105	10.000.000	5105	10.000.000	5105	10.000.000	5105	10.000.000	5105	10.000.000	
0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	685	688	10.000.000	688	10.000.000	688	10.000.000	688	10.000.000	688	10.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	43	43	8.000.000	43	8.000.000	43	8.000.000	43	8.000.000	43	8.000.000	
0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	587	587	30.000.000	587	30.000.000	587	30.000.000	587	30.000.000	587	30.000.000	
0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	1242	1242	5.000.000	1242	5.000.000	1242	5.000.000	1242	5.000.000	1242	5.000.000	
0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	10	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	
0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	3.181.347.000	1	3.181.347.000	1	3.181.347.000	1	3.181.347.000	1	3.181.347.000	
0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	23	23	15.000.000	23	15.000.000	23	15.000.000	23	15.000.000	23	15.000.000	
0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	3	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	
0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
PUSKESMAS MULYOHARJO						**3.924.227.000**		**3.924.227.000**		**3.924.227.000**		**3.924.227.000**		**3.924.227.000**	
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**					**3.924.227.000**		**3.924.227.000**		**3.924.227.000**		**3.924.227.000**		**3.924.227.000**	
2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**3.924.227.000**		**3.924.227.000**		**3.924.227.000**		**3.924.227.000**		**3.924.227.000**	
		Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas	**Indeks**	**0**	**95**		**96**		**97**		**98**		**99**		
		Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas	**%**	**0**	**65**		**70**		**75**		**80**		**80**		
0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1238	1232	60.000.000	1232	60.000.000	1232	60.000.000	1232	60.000.000	1232	60.000.000	
0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1181	1176	10.000.000	1176	10.000.000	1176	10.000.000	1176	10.000.000	1176	10.000.000	
0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1125	1120	10.000.000	1120	10.000.000	1120	10.000.000	1120	10.000.000	1120	10.000.000	
0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5492	5472	10.000.000	5472	10.000.000	5472	10.000.000	5472	10.000.000	5472	10.000.000	
0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	11177	11013	50.000.000	11013	50.000.000	11013	50.000.000	11013	50.000.000	11013	50.000.000	
0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	45847	45744	10.000.000	45744	10.000.000	45744	10.000.000	45744	10.000.000	45744	10.000.000	
0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	10538	10838	10.000.000	10838	10.000.000	10838	10.000.000	10838	10.000.000	10838	10.000.000	
0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7871	7899	10.000.000	7899	10.000.000	7899	10.000.000	7899	10.000.000	7899	10.000.000	
0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1060	1064	10.000.000	1064	10.000.000	1064	10.000.000	1064	10.000.000	1064	10.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	66	66	8.000.000	66	8.000.000	66	8.000.000	66	8.000.000	66	8.000.000	
0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	908	908	20.000.000	908	20.000.000	908	20.000.000	908	20.000.000	908	20.000.000	
0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	1741	1741	5.000.000	1741	5.000.000	1741	5.000.000	1741	5.000.000	1741	5.000.000	
0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	
0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	10	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	
0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	3.380.727.000	1	3.380.727.000	1	3.380.727.000	1	3.380.727.000	1	3.380.727.000	
0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	14	14	5.000.000	14	5.000.000	14	5.000.000	14	5.000.000	14	5.000.000	
0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	3	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
PUSKESMAS KEBONDALEM						**3.849.811.000**		**3.849.811.000**		**3.849.811.000**		**3.849.811.000**		**3.849.811.000**	
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**					**3.849.811.000**		**3.849.811.000**		**3.849.811.000**		**3.849.811.000**		**3.849.811.000**	
2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**3.849.811.000**		**3.849.811.000**		**3.849.811.000**		**3.849.811.000**		**3.849.811.000**	
		Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas	**Indeks**	**0**	**95**		**96**		**97**		**98**		**99**		
		Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas	**%**	**0**	**65**		**70**		**75**		**80**		**80**		
0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	943	938	50.000.000	938	50.000.000	938	50.000.000	938	50.000.000	938	50.000.000	
0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	900	896	10.000.000	896	10.000.000	896	10.000.000	896	10.000.000	896	10.000.000	
0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	857	853	10.000.000	853	10.000.000	853	10.000.000	853	10.000.000	853	10.000.000	
0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4184	4168	10.000.000	4168	10.000.000	4168	10.000.000	4168	10.000.000	4168	10.000.000	
0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	8513	8389	40.000.000	8389	40.000.000	8389	40.000.000	8389	40.000.000	8389	40.000.000	
0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	34923	34845	10.000.000	34845	10.000.000	34845	10.000.000	34845	10.000.000	34845	10.000.000	
0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	8027	8256	10.000.000	8256	10.000.000	8256	10.000.000	8256	10.000.000	8256	10.000.000	
0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5996	6017	10.000.000	6017	10.000.000	6017	10.000.000	6017	10.000.000	6017	10.000.000	
0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	807	810	10.000.000	810	10.000.000	810	10.000.000	810	10.000.000	810	10.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	50	50	8.000.000	50	8.000.000	50	8.000.000	50	8.000.000	50	8.000.000	
0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	692	692	15.000.000	692	15.000.000	692	15.000.000	692	15.000.000	692	15.000.000	
0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	1402	1402	5.000.000	1402	5.000.000	1402	5.000.000	1402	5.000.000	1402	5.000.000	
0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	10	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	
0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	
0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	3.389.311.000	1	3.389.311.000	1	3.389.311.000	1	3.389.311.000	1	3.389.311.000	
0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	32	32	5.000.000	32	5.000.000	32	5.000.000	32	5.000.000	32	5.000.000	
0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	3	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
PUSKESMAS BANJARDAWA						**3.555.871.000**		**3.555.871.000**		**3.555.871.000**		**3.555.871.000**		**3.555.871.000**	
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**					**3.555.871.000**		**3.555.871.000**		**3.555.871.000**		**3.555.871.000**		**3.555.871.000**	
2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**3.555.871.000**		**3.555.871.000**		**3.555.871.000**		**3.555.871.000**		**3.555.871.000**	
		Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas	**Indeks**	**0**	**95**		**96**		**97**		**98**		**99**		
		Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas	**%**	**0**	**65**		**70**		**75**		**80**		**80**		
0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	773	769	50.000.000	769	50.000.000	769	50.000.000	769	50.000.000	769	50.000.000	
0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	738	734	10.000.000	734	10.000.000	734	10.000.000	734	10.000.000	734	10.000.000	
0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	703	699	10.000.000	699	10.000.000	699	10.000.000	699	10.000.000	699	10.000.000	
0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3430	3418	10.000.000	3418	10.000.000	3418	10.000.000	3418	10.000.000	3418	10.000.000	
0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6982	6878	50.000.000	6878	50.000.000	6878	50.000.000	6878	50.000.000	6878	50.000.000	
0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	28635	28571	10.000.000	28571	10.000.000	28571	10.000.000	28571	10.000.000	28571	10.000.000	
0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6582	6770	10.000.000	6770	10.000.000	6770	10.000.000	6770	10.000.000	6770	10.000.000	
0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4916	4933	10.000.000	4933	10.000.000	4933	10.000.000	4933	10.000.000	4933	10.000.000	
0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	662	664	10.000.000	664	10.000.000	664	10.000.000	664	10.000.000	664	10.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	41	41	8.000.000	41	8.000.000	41	8.000.000	41	8.000.000	41	8.000.000	
0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	567	567	15.000.000	567	15.000.000	567	15.000.000	567	15.000.000	567	15.000.000	
0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	1205	1205	5.000.000	1205	5.000.000	1205	5.000.000	1205	5.000.000	1205	5.000.000	
0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	10	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	
0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	
0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	3.055.371.000	1	3.055.371.000	1	3.055.371.000	1	3.055.371.000	1	3.055.371.000	
0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	69	69	5.000.000	69	5.000.000	69	5.000.000	69	5.000.000	69	5.000.000	
0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	3	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
PUSKESMAS KABUNAN						**2.984.314.000**		**2.984.314.000**		**2.984.314.000**		**2.984.314.000**		**2.984.314.000**	
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**					**2.984.314.000**		**2.984.314.000**		**2.984.314.000**		**2.984.314.000**		**2.984.314.000**	
2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**2.984.314.000**		**2.984.314.000**		**2.984.314.000**		**2.984.314.000**		**2.984.314.000**	
		Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas	**Indeks**	**0**	**95**		**96**		**97**		**98**		**99**		
		Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas	**%**	**0**	**65**		**70**		**75**		**80**		**80**		
0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	843	840	50.000.000	840	50.000.000	840	50.000.000	840	50.000.000	840	50.000.000	
0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	805	801	10.000.000	801	10.000.000	801	10.000.000	801	10.000.000	801	10.000.000	
0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	767	763	10.000.000	763	10.000.000	763	10.000.000	763	10.000.000	763	10.000.000	
0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3743	3730	10.000.000	3730	10.000.000	3730	10.000.000	3730	10.000.000	3730	10.000.000	
0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7617	7507	20.000.000	7507	20.000.000	7507	20.000.000	7507	20.000.000	7507	20.000.000	
0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	31247	31177	10.000.000	31177	10.000.000	31177	10.000.000	31177	10.000.000	31177	10.000.000	
0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7182	7386	10.000.000	7386	10.000.000	7386	10.000.000	7386	10.000.000	7386	10.000.000	
0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5365	5383	10.000.000	5383	10.000.000	5383	10.000.000	5383	10.000.000	5383	10.000.000	
0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	722	725	10.000.000	725	10.000.000	725	10.000.000	725	10.000.000	725	10.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	45	45	8.000.000	45	8.000.000	45	8.000.000	45	8.000.000	45	8.000.000	
0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	619	619	15.000.000	619	15.000.000	619	15.000.000	619	15.000.000	619	15.000.000	
0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	1376	1376	5.000.000	1376	5.000.000	1376	5.000.000	1376	5.000.000	1376	5.000.000	
0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	
0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	10	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	
0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	2.575.814.000	1	2.575.814.000	1	2.575.814.000	1	2.575.814.000	1	2.575.814.000	
0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	35	35	5.000.000	35	5.000.000	35	5.000.000	35	5.000.000	35	5.000.000	
0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	3	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
PUSKESMAS JEBED						**3.564.794.000**		**3.564.794.000**		**3.564.794.000**		**3.564.794.000**		**3.564.794.000**	
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**					**3.564.794.000**		**3.564.794.000**		**3.564.794.000**		**3.564.794.000**		**3.564.794.000**	
2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**3.564.794.000**		**3.564.794.000**		**3.564.794.000**		**3.564.794.000**		**3.564.794.000**	
		Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas	**Indeks**	**0**	**95**		**96**		**97**		**98**		**99**		
		Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas	**%**	**0**	**65**		**70**		**75**		**80**		**80**		
0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1101	1096	80.000.000	1096	80.000.000	1096	80.000.000	1096	80.000.000	1096	80.000.000	
0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1051	1046	10.000.000	1046	10.000.000	1046	10.000.000	1046	10.000.000	1046	10.000.000	
0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1001	996	10.000.000	996	10.000.000	996	10.000.000	996	10.000.000	996	10.000.000	
0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4885	4867	10.000.000	4867	10.000.000	4867	10.000.000	4867	10.000.000	4867	10.000.000	
0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	9942	9795	25.000.000	9795	25.000.000	9795	25.000.000	9795	25.000.000	9795	25.000.000	
0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	40780	40687	10.000.000	40687	10.000.000	40687	10.000.000	40687	10.000.000	40687	10.000.000	
0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	9373	9640	10.000.000	9640	10.000.000	9640	10.000.000	9640	10.000.000	9640	10.000.000	
0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7001	7026	10.000.000	7026	10.000.000	7026	10.000.000	7026	10.000.000	7026	10.000.000	
0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	943	946	10.000.000	946	10.000.000	946	10.000.000	946	10.000.000	946	10.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	59	59	8.000.000	59	8.000.000	59	8.000.000	59	8.000.000	59	8.000.000	
0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	808	808	15.000.000	808	15.000.000	808	15.000.000	808	15.000.000	808	15.000.000	
0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	1593	1593	5.000.000	1593	5.000.000	1593	5.000.000	1593	5.000.000	1593	5.000.000	
0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	10	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	
0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	2.911.294.000	1	2.911.294.000	1	2.911.294.000	1	2.911.294.000	1	2.911.294.000	
0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	28	28	5.000.000	28	5.000.000	28	5.000.000	28	5.000.000	28	5.000.000	
0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	3	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	1	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	
0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
PUSKESMAS PETARUKAN						**4.510.380.000**		**4.510.380.000**		**4.510.380.000**		**4.510.380.000**		**4.510.380.000**	
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**					**4.510.380.000**		**4.510.380.000**		**4.510.380.000**		**4.510.380.000**		**4.510.380.000**	
2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**4.510.380.000**		**4.510.380.000**		**4.510.380.000**		**4.510.380.000**		**4.510.380.000**	
		Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas	**Indeks**	**0**	**95**		**96**		**97**		**98**		**99**		
		Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas	**%**	**0**	**65**		**70**		**75**		**80**		**80**		
0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	815	811	60.000.000	811	60.000.000	811	60.000.000	811	60.000.000	811	60.000.000	
0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	778	774	10.000.000	774	10.000.000	774	10.000.000	774	10.000.000	774	10.000.000	
0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	741	738	10.000.000	738	10.000.000	738	10.000.000	738	10.000.000	738	10.000.000	
0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3617	3604	10.000.000	3604	10.000.000	3604	10.000.000	3604	10.000.000	3604	10.000.000	
0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7360	7253	25.000.000	7253	25.000.000	7253	25.000.000	7253	25.000.000	7253	25.000.000	
0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	30195	30127	10.000.000	30127	10.000.000	30127	10.000.000	30127	10.000.000	30127	10.000.000	
0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6940	7138	10.000.000	7138	10.000.000	7138	10.000.000	7138	10.000.000	7138	10.000.000	
0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5184	5202	10.000.000	5202	10.000.000	5202	10.000.000	5202	10.000.000	5202	10.000.000	
0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	698	701	10.000.000	701	10.000.000	701	10.000.000	701	10.000.000	701	10.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	43	43	8.000.000	43	8.000.000	43	8.000.000	43	8.000.000	43	8.000.000	
0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	598	598	15.000.000	598	15.000.000	598	15.000.000	598	15.000.000	598	15.000.000	
0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	1244	1244	5.000.000	1244	5.000.000	1244	5.000.000	1244	5.000.000	1244	5.000.000	
0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	340.000.000	1	340.000.000	1	340.000.000	1	340.000.000	1	340.000.000	
0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	10	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	
0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	
0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	3.824.880.000	1	3.824.880.000	1	3.824.880.000	1	3.824.880.000	1	3.824.880.000	
0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	21	21	5.000.000	21	5.000.000	21	5.000.000	21	5.000.000	21	5.000.000	
0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	3	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
PUSKESMAS KARANGASEM						**2.940.305.000**		**2.940.305.000**		**2.940.305.000**		**2.940.305.000**		**2.940.305.000**	
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**					**2.940.305.000**		**2.940.305.000**		**2.940.305.000**		**2.940.305.000**		**2.940.305.000**	
2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**2.940.305.000**		**2.940.305.000**		**2.940.305.000**		**2.940.305.000**		**2.940.305.000**	
		Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas	**Indeks**	**0**	**95**		**96**		**97**		**98**		**99**		
		Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas	**%**	**0**	**65**		**70**		**75**		**80**		**80**		
0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	618	615	100.000.000	615	100.000.000	615	100.000.000	615	100.000.000	615	100.000.000	
0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	590	587	10.000.000	587	10.000.000	587	10.000.000	587	10.000.000	587	10.000.000	
0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	994	559	10.000.000	559	10.000.000	559	10.000.000	559	10.000.000	559	10.000.000	
0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2741	2730	10.000.000	2730	10.000.000	2730	10.000.000	2730	10.000.000	2730	10.000.000	
0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5578	5496	30.000.000	5496	30.000.000	5496	30.000.000	5496	30.000.000	5496	30.000.000	
0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	22879	22829	10.000.000	22829	10.000.000	22829	10.000.000	22829	10.000.000	22829	10.000.000	
0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5259	5409	10.000.000	5409	10.000.000	5409	10.000.000	5409	10.000.000	5409	10.000.000	
0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3928	3942	10.000.000	3942	10.000.000	3942	10.000.000	3942	10.000.000	3942	10.000.000	
0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	529	531	10.000.000	531	10.000.000	531	10.000.000	531	10.000.000	531	10.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	33	33	8.000.000	33	8.000.000	33	8.000.000	33	8.000.000	33	8.000.000	
0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	453	453	15.000.000	453	15.000.000	453	15.000.000	453	15.000.000	453	15.000.000	
0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	1071	1071	5.000.000	1071	5.000.000	1071	5.000.000	1071	5.000.000	1071	5.000.000	
0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	10	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	
0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	
0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	2.311.805.000	1	2.311.805.000	1	2.311.805.000	1	2.311.805.000	1	2.311.805.000	
0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	16	16	5.000.000	16	5.000.000	16	5.000.000	16	5.000.000	16	5.000.000	
0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	3	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
PUSKESMAS KLAREYAN						**4.304.391.000**		**4.304.391.000**		**4.304.391.000**		**4.304.391.000**		**4.304.391.000**	
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**					**4.304.391.000**		**4.304.391.000**		**4.304.391.000**		**4.304.391.000**		**4.304.391.000**	
2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**4.304.391.000**		**4.304.391.000**		**4.304.391.000**		**4.304.391.000**		**4.304.391.000**	
		Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas	**Indeks**	**0**	**95**		**96**		**97**		**98**		**99**		
		Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas	**%**	**0**	**65**		**70**		**75**		**80**		**80**		
0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1041	1037	40.000.000	1037	40.000.000	1037	40.000.000	1037	40.000.000	1037	40.000.000	
0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	562	559	10.000.000	559	10.000.000	559	10.000.000	559	10.000.000	559	10.000.000	
0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	947	942	10.000.000	942	10.000.000	942	10.000.000	942	10.000.000	942	10.000.000	
0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4621	4604	10.000.000	4604	10.000.000	4604	10.000.000	4604	10.000.000	4604	10.000.000	
0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	9404	9267	40.000.000	9267	40.000.000	9267	40.000.000	9267	40.000.000	9267	40.000.000	
0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	38577	38492	10.000.000	38492	10.000.000	38492	10.000.000	38492	10.000.000	38492	10.000.000	
0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	8867	9120	10.000.000	9120	10.000.000	9120	10.000.000	9120	10.000.000	9120	10.000.000	
0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6623	6647	10.000.000	6647	10.000.000	6647	10.000.000	6647	10.000.000	6647	10.000.000	
0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	892	895	10.000.000	895	10.000.000	895	10.000.000	895	10.000.000	895	10.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	55	55	8.000.000	55	8.000.000	55	8.000.000	55	8.000.000	55	8.000.000	
0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	764	764	15.000.000	764	15.000.000	764	15.000.000	764	15.000.000	764	15.000.000	
0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	1490	1490	5.000.000	1490	5.000.000	1490	5.000.000	1490	5.000.000	1490	5.000.000	
0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	10	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	
0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	3.888.891.000	1	3.888.891.000	1	3.888.891.000	1	3.888.891.000	1	3.888.891.000	
0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	48	48	5.000.000	48	5.000.000	48	5.000.000	48	5.000.000	48	5.000.000	
0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	3	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
PUSKESMAS LOSARI						**4.871.737.000**		**4.871.737.000**		**4.871.737.000**		**4.871.737.000**		**4.871.737.000**	
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**					**4.871.737.000**		**4.871.737.000**		**4.871.737.000**		**4.871.737.000**		**4.871.737.000**	
2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**4.871.737.000**		**4.871.737.000**		**4.871.737.000**		**4.871.737.000**		**4.871.737.000**	
		Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas	**Indeks**	**0**	**95**		**96**		**97**		**98**		**99**		
		Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas	**%**	**0**	**65**		**70**		**75**		**80**		**80**		
0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1114	1109	60.000.000	1109	60.000.000	1109	60.000.000	1109	60.000.000	1109	60.000.000	
0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1064	1058	10.000.000	1058	10.000.000	1058	10.000.000	1058	10.000.000	1058	10.000.000	
0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1013	1008	10.000.000	1008	10.000.000	1008	10.000.000	1008	10.000.000	1008	10.000.000	
0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4944	4927	10.000.000	4927	10.000.000	4927	10.000.000	4927	10.000.000	4927	10.000.000	
0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	10061	9915	30.000.000	9915	30.000.000	9915	30.000.000	9915	30.000.000	9915	30.000.000	
0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	41273	41180	10.000.000	41180	10.000.000	41180	10.000.000	41180	10.000.000	41180	10.000.000	
0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	9486	9757	10.000.000	9757	10.000.000	9757	10.000.000	9757	10.000.000	9757	10.000.000	
0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7086	7111	10.000.000	7111	10.000.000	7111	10.000.000	7111	10.000.000	7111	10.000.000	
0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	954	958	10.000.000	958	10.000.000	958	10.000.000	958	10.000.000	958	10.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	59	59	8.000.000	59	8.000.000	59	8.000.000	59	8.000.000	59	8.000.000	
0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	817	817	20.000.000	817	20.000.000	817	20.000.000	817	20.000.000	817	20.000.000	
0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	1610	1610	5.000.000	1610	5.000.000	1610	5.000.000	1610	5.000.000	1610	5.000.000	
0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	10	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	
0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	4.196.237.000	1	4.196.237.000	1	4.196.237.000	1	4.196.237.000	1	4.196.237.000	
0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	54	54	5.000.000	54	5.000.000	54	5.000.000	54	5.000.000	54	5.000.000	
0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	3	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
PUSKESMAS PURWOHARJO						**5.093.523.000**		**5.093.523.000**		**5.093.523.000**		**5.093.523.000**		**5.093.523.000**	
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**					**5.093.523.000**		**5.093.523.000**		**5.093.523.000**		**5.093.523.000**		**5.093.523.000**	
2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**5.093.523.000**		**5.093.523.000**		**5.093.523.000**		**5.093.523.000**		**5.093.523.000**	
		Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas	**Indeks**	**0**	**95**		**96**		**97**		**98**		**99**		
		Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas	**%**	**0**	**65**		**70**		**75**		**80**		**80**		
0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	933	929	100.000.000	929	100.000.000	929	100.000.000	929	100.000.000	929	100.000.000	
0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	891	887	10.000.000	887	10.000.000	887	10.000.000	887	10.000.000	887	10.000.000	
0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	848	844	10.000.000	844	10.000.000	844	10.000.000	844	10.000.000	844	10.000.000	
0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4141	4126	10.000.000	4126	10.000.000	4126	10.000.000	4126	10.000.000	4126	10.000.000	
0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	8427	8303	20.000.000	8303	20.000.000	8303	20.000.000	8303	20.000.000	8303	20.000.000	
0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	34569	34491	10.000.000	34491	10.000.000	34491	10.000.000	34491	10.000.000	34491	10.000.000	
0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7946	8172	10.000.000	8172	10.000.000	8172	10.000.000	8172	10.000.000	8172	10.000.000	
0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5935	5956	10.000.000	5956	10.000.000	5956	10.000.000	5956	10.000.000	5956	10.000.000	
0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	799	802	10.000.000	802	10.000.000	802	10.000.000	802	10.000.000	802	10.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	50	50	8.000.000	50	8.000.000	50	8.000.000	50	8.000.000	50	8.000.000	
0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	685	685	15.000.000	685	15.000.000	685	15.000.000	685	15.000.000	685	15.000.000	
0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	1405	1405	5.000.000	1405	5.000.000	1405	5.000.000	1405	5.000.000	1405	5.000.000	
0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	210.000.000	1	210.000.000	1	210.000.000	1	210.000.000	1	210.000.000	
0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	10	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	
0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	4.523.023.000	1	4.523.023.000	1	4.523.023.000	1	4.523.023.000	1	4.523.023.000	
0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	44	44	5.000.000	44	5.000.000	44	5.000.000	44	5.000.000	44	5.000.000	
0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	3	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
PUSKESMAS SARWODADI						**2.816.866.000**		**2.816.866.000**		**2.816.866.000**		**2.816.866.000**		**2.816.866.000**	
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**					**2.816.866.000**		**2.816.866.000**		**2.816.866.000**		**2.816.866.000**		**2.816.866.000**	
2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**2.816.866.000**		**2.816.866.000**		**2.816.866.000**		**2.816.866.000**		**2.816.866.000**	
		Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas	**Indeks**	**0**	**95**		**96**		**97**		**98**		**99**		
		Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas	**%**	**0**	**65**		**70**		**75**		**80**		**80**		
0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	558	555	60.000.000	555	60.000.000	555	60.000.000	555	60.000.000	555	60.000.000	
0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	532	530	10.000.000	530	10.000.000	530	10.000.000	530	10.000.000	530	10.000.000	
0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	507	505	10.000.000	505	10.000.000	505	10.000.000	505	10.000.000	505	10.000.000	
0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2476	2467	10.000.000	2467	10.000.000	2467	10.000.000	2467	10.000.000	2467	10.000.000	
0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5039	4965	20.000.000	4965	20.000.000	4965	20.000.000	4965	20.000.000	4965	20.000.000	
0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	20667	20621	10.000.000	20621	10.000.000	20621	10.000.000	20621	10.000.000	20621	10.000.000	
0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4750	4886	10.000.000	4886	10.000.000	4886	10.000.000	4886	10.000.000	4886	10.000.000	
0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3548	3561	10.000.000	3561	10.000.000	3561	10.000.000	3561	10.000.000	3561	10.000.000	
0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	478	480	10.000.000	480	10.000.000	480	10.000.000	480	10.000.000	480	10.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	30	30	8.000.000	30	8.000.000	30	8.000.000	30	8.000.000	30	8.000.000	
0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	409	409	15.000.000	409	15.000.000	409	15.000.000	409	15.000.000	409	15.000.000	
0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	1045	1045	5.000.000	1045	5.000.000	1045	5.000.000	1045	5.000.000	1045	5.000.000	
0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	
0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	10	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	
0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	2.281.366.000	1	2.281.366.000	1	2.281.366.000	1	2.281.366.000	1	2.281.366.000	
0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	26	26	5.000.000	26	5.000.000	26	5.000.000	26	5.000.000	26	5.000.000	
0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	3	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
PUSKESMAS ROWOSARI						**2.567.885.000**		**2.567.885.000**		**2.567.885.000**		**2.567.885.000**		**2.567.885.000**	
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**					**2.567.885.000**		**2.567.885.000**		**2.567.885.000**		**2.567.885.000**		**2.567.885.000**	
2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**2.567.885.000**		**2.567.885.000**		**2.567.885.000**		**2.567.885.000**		**2.567.885.000**	
		Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas	**Indeks**	**0**	**95**		**96**		**97**		**98**		**99**		
		Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas	**%**	**0**	**65**		**70**		**75**		**80**		**80**		
0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	556	553	50.000.000	553	50.000.000	553	50.000.000	553	50.000.000	553	50.000.000	
0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	531	528	10.000.000	528	10.000.000	528	10.000.000	528	10.000.000	528	10.000.000	
0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	505	503	10.000.000	503	10.000.000	503	10.000.000	503	10.000.000	503	10.000.000	
0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2467	2458	10.000.000	2458	10.000.000	2458	10.000.000	2458	10.000.000	2458	10.000.000	
0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5021	4947	20.000.000	4947	20.000.000	4947	20.000.000	4947	20.000.000	4947	20.000.000	
0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	20594	20547	10.000.000	20547	10.000.000	20547	10.000.000	20547	10.000.000	20547	10.000.000	
0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4733	4868	10.000.000	4868	10.000.000	4868	10.000.000	4868	10.000.000	4868	10.000.000	
0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3536	3548	10.000.000	3548	10.000.000	3548	10.000.000	3548	10.000.000	3548	10.000.000	
0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	476	478	10.000.000	478	10.000.000	478	10.000.000	478	10.000.000	478	10.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	30	30	8.000.000	30	8.000.000	30	8.000.000	30	8.000.000	30	8.000.000	
0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	408	408	15.000.000	408	15.000.000	408	15.000.000	408	15.000.000	408	15.000.000	
0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	1057	1057	5.000.000	1057	5.000.000	1057	5.000.000	1057	5.000.000	1057	5.000.000	
0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	10	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	
0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	2.044.385.000	1	2.044.385.000	1	2.044.385.000	1	2.044.385.000	1	2.044.385.000	
0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	36	36	5.000.000	36	5.000.000	36	5.000.000	36	5.000.000	36	5.000.000	
0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	3	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
PUSKESMAS MOJO						**4.071.229.000**		**4.071.229.000**		**4.071.229.000**		**4.071.229.000**		**4.071.229.000**	
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**					**4.071.229.000**		**4.071.229.000**		**4.071.229.000**		**4.071.229.000**		**4.071.229.000**	
2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**4.071.229.000**		**4.071.229.000**		**4.071.229.000**		**4.071.229.000**		**4.071.229.000**	
		Indeks SPM Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas	**Indeks**	**0**	**95**		**96**		**97**		**98**		**99**		
		Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Puskesmas	**%**	**0**	**65**		**70**		**75**		**80**		**80**		
0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1136	1130	60.000.000	1130	60.000.000	1130	60.000.000	1130	60.000.000	1130	60.000.000	
0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1084	1079	10.000.000	1079	10.000.000	1079	10.000.000	1079	10.000.000	1079	10.000.000	
0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1033	1028	10.000.000	1028	10.000.000	1028	10.000.000	1028	10.000.000	1028	10.000.000	
0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5040	5021	10.000.000	5021	10.000.000	5021	10.000.000	5021	10.000.000	5021	10.000.000	
0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	10256	10106	20.000.000	10106	20.000.000	10106	20.000.000	10106	20.000.000	10106	20.000.000	
0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	42069	41974	10.000.000	41974	10.000.000	41974	10.000.000	41974	10.000.000	41974	10.000.000	
0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	9670	9945	10.000.000	9945	10.000.000	9945	10.000.000	9945	10.000.000	9945	10.000.000	
0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7223	7248	10.000.000	7248	10.000.000	7248	10.000.000	7248	10.000.000	7248	10.000.000	
0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	973	976	10.000.000	976	10.000.000	976	10.000.000	976	10.000.000	976	10.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	60	61	8.000.000	61	8.000.000	61	8.000.000	61	8.000.000	61	8.000.000	
0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	833	833	15.000.000	833	15.000.000	833	15.000.000	833	15.000.000	833	15.000.000	
0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	1524	1524	5.000.000	1524	5.000.000	1524	5.000.000	1524	5.000.000	1524	5.000.000	
0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	10	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	
0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	3.477.729.000	1	3.477.729.000	1	3.477.729.000	1	3.477.729.000	1	3.477.729.000	
0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	41	41	30.000.000	41	30.000.000	41	30.000.000	41	30.000.000	41	30.000.000	
0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	3	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	*BASELINE* 2024	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
LABKESDA KAB. PEMALANG						**300.000.000**		**300.000.000**		**300.000.000**		**300.000.000**		**300.000.000**	
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**					**300.000.000**		**300.000.000**		**300.000.000**		**300.000.000**		**300.000.000**	
2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**300.000.000**		**300.000.000**		**300.000.000**		**300.000.000**		**300.000.000**	
		Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Labkesda	**%**	**0**	**65**		**70**		**75**		**80**		**80**		
0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.2 URAIAN SUB KEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam upaya mendukung program prioritas pembangunan daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan guna peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pemalang, berikut ini daftar kegiatan dan sub kegiatan prioritas urusan kesehatan dalam lima tahun kedepan:

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	
			• Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	
			• Pembangunan Puskesmas	
			• Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			• Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	
			• Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
			• Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			• Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			• Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			• Pengembangan Rumah Sakit	
			• Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
			• Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	
			Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/ Kota	
			• Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
			• Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
			• Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
			• Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
			• Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			• Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
			• Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
			• Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
			• Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
			• Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
			• Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
			• Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
			• Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
			• Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
			• Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
			• Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
			• Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
			• Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	
			• Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
			• Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
			• Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
			• Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
			• Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
			• Operasional Pelayanan Puskesmas	
			• Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			• Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
			• Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	
			• Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
			• Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	
			• Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
			• Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
			• Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
			• Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
			• Pengelolaan Layanan Imunisasi	
			• Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	
			• Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
			• Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	
			Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			• Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	

Sedangkan upaya mendukung program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Pemalang periode Tahun 2025-2030, dalam rangka meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan pulik yang baik, berikut ini daftar program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati dalam lima tahun kedepan.

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati

No	Program Unggulan	Program	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Satu Ambulance, Satu Desa	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	
				• Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				• Pengelolaan Layanan Rujukan dan Rujuk Balik	

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.3 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH

Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yaitu, Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja tujuan adalah Usia Harapan Hidup. Dengan meningkatnya usia harapan hidup diharapkan mendukung Tujuan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yaitu meningkatkan daya saing pembangunan daerah dengan salah satu sasarannya yaitu meningkatnya kualitas SDM daerah, dalam upaya meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan juga mewujudkan Misi Keempat Pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 yaitu Peduli, meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat.

Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Untuk sasaran yang pertama, Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja sasaran; Jumlah Kematian Ibu, Jumlah Kematian Balita, Prevalensi Stunting, Angka Populasi Bebas Penyakit Menular, Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular dan Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai Standar. Sedangkan sasaran kedua, Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator kinerja sasaran; Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai Sakip Perangkat Daerah.

Untuk mengetahui Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan tercapai, maka diperlukan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan urusan kesehatan. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran atau program dan kegiatan telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan target yang direncanakan. Dengan adanya indikator kinerja maka dalam penyusunan perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan akan dapat tercapai. Untuk itu penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan meningkatkan kualitas perencanaan dengan menetapkan sasaran yang terukur dan dapat dibuktikan secara obyektif keberhasilannya.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Indikator kinerja utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dalam lima tahun mendatang. Indikator kinerja utama Dinas Kesehatan ini menjadi tolok ukur kinerja yang akan menjadi bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan urusan kesehatan di Kabupaten Pemalang. Untuk itu indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,23	75,50	74,75	75,00	75,25	75,50	75,75	IUP, RIBK
2	Jumlah Kematian Ibu	Kasus	10	10	10	10	10	9	9	RIBK
3	Jumlah Kematian Balita	Kasus	123	120	118	116	114	112	110	RIBK
4	Prevalensi Stunting	%	19,10	19,00	18,75	18,50	18,25	18,00	17,75	IUP, RIBK
5	Angka Populasi Bebas Penyakit Menular	%	0	24	32	40	48	56	64	
6	Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular	%	0	60	64	68	72	76	80	
7	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	%	0	59,5	59,5	59,5	68,5	68,5	77,5	RIBK
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89,09	89,1	89,2	89,3	89,4	89,5	89,5	
9	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	63,61	65	66	67	68	69	70	

4.4 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Selain indikator kinerja utama, juga ditetapkan indikator kinerja kunci (IKK) Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan

https://jdih.pemalangkab.go.id

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada Peraturan tersebut. terdapat indikator kinerja kunci urusan kesehatan kabupaten/ kota sebanyak 14 indikator kinerja yang selanjutnya dimasukkan dalam RPJMD dan ditetapkan menjadi indikator kinerja kunci Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci
Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (Per 1.000 Penduduk)	Rasio	0,73	0,73	0,73	0,74	0,74	0,75	0,75	IKK
2	Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	IKK
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	99,9	100	100	100	100	100	100	IKK, SPM
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	96,2	100	100	100	100	100	100	IKK, SPM
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100	100	100	IKK, SPM
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	IKK, SPM
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	IKK, SPM
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	98,2	100	100	100	100	100	100	IKK, SPM
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	99,8	100	100	100	100	100	100	IKK, SPM
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	98,3	100	100	100	100	100	100	IKK, SPM
11	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	IKK, SPM

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	IKK, SPM
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	94,6	100	100	100	100	100	100	IKK, SPM
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	86,6	100	100	100	100	100	100	IKK, SPM

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif. Renstra ini dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan untuk kurun waktu lima tahun kedepan.

Pencapaian target indikator kinerja Renstra Dinas Kesehatan ini merupakan serangkaian upaya dalam rangka mencapai indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang serta program prioritas yang termuat dalam Renstra ini. Dalam pelaksanaannya dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kapasitas yang tersedia baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat yang secara sinergis bersama untuk mencapai tujuan perangkat daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

5.1 KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan yang perlu diatur dalam pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang dan unit kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang agar mendukung pencapaian target-target Renstra Tahun 2025-2029 dan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum Renstra Dinas Kesehatan dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur, baik yang di Sekretariat, bidang dan unit kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

https://jdih.pemalangkab.go.id

4. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional, tingkat Provinsi Jawa Tengah dan atau perubahan kebijakan Kabupaten Pemalang, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 KAIDAH TRANSISI

Masa berlaku Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 sama dengan masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029. Pada masa transisi Tahun 2030 saat Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2030-2034 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan kesehatan, maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2030 berpedoman pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan periode tahap ke-2 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045.

Demikian rencana strategis ini disusun sebagai dasar untuk memenuhi dokumen perencanaan pembangunan kesehatan Tahun 2025-2029. Disadari bahwa dalam penyusunan rencana strategis ini jauh dari sempurna dan masih memiliki keterbatasan-keterbatasan sebagaimana dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 217 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sehingga Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dibentuk dalam rangka membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial, urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Hal ini selaras dengan pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang, bahwa Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang urusan pemerintahan bidang Sosial, urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sehingga Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang merupakan institusi yang bertugas secara proaktif berperan dalam menurunkan kemiskinan, stunting, angka kelahiran, dan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Agar tujuan tersebut dapat tercapai harus didukung oleh perencanaan yang baik sehingga perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang sebagai salah satu PD harus menyusun Renstra. Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang merupakan bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih yang dilaksanakan

https://jdih.pemalangkab.go.id

secara simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kementrian Sosial, Renstra BKKBN dan Renstra Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Renstra menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan

Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan keterkaitan antara tujuan dan sasaran Daerah dengan tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang, dimana program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang harus mendukung tujuan dan sasaran Daerah sehingga visi dan misi Daerah dapat tercapai.

Proses penyusunan Renstra meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, terdiri dari pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah, agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah; (4) Forum

https://jdih.pemalangkab.go.id

Perangkat Daerah; (5) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (6) Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Dokumen Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang. Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut :

Gambar 1.1
Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

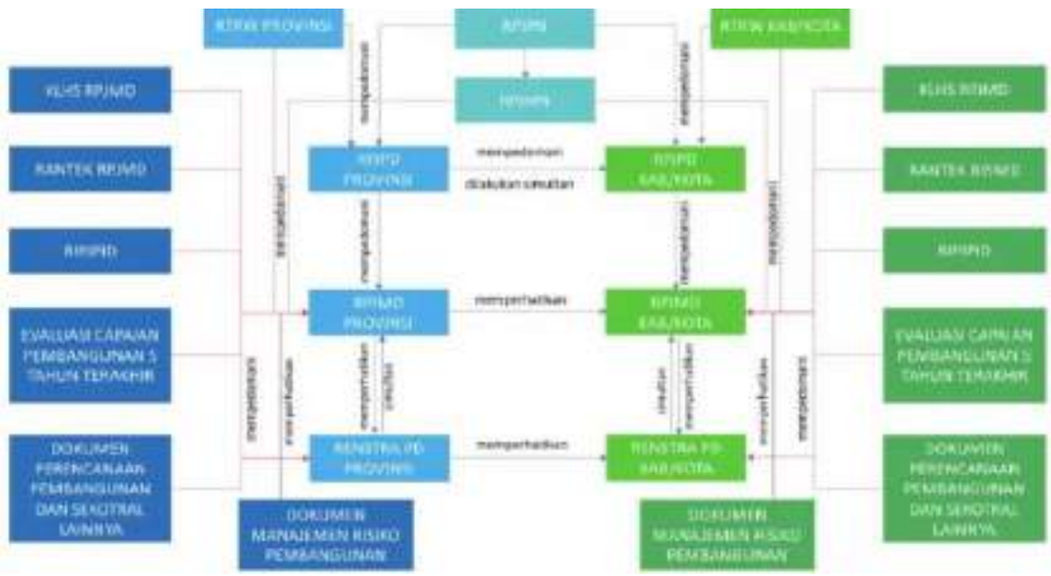
RPJPN
RPJMN
RPJPD PROVINSI
RPJPD KAB/KOTA
RPJMD PROVINSI
RPJMD KAB/KOTA
RENSTRA PD PROVINSI
RENSTRA PD KAB/KOTA
menyelaraskan
menjabarkan
menyerahkan
menyerahkan
menyerah

https://jdih.pemalangkab.go.id

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

https://jdih.pemalangkab.go.id

10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ...);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2050 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang; (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 7);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Pemalang;
22. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Pemalang Tahun 2023-2026;
23. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
24. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima yang mencakup gambaran kinerja, permasalah, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang sebagai penjabaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang, adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dalam mendukung visi dan misi bupati;

https://jdih.pemalangkab.go.id

2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, tujuan, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah serta Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, dan Arah Kebijakan.

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah, termasuk indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci perangkat daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun kesesuaian anggaran dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan DinsosKBPP Kabupaten Pemalang

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13) dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang serta Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang mempunyai struktur organisasi meliputi :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat membawahi 2 sub bagian yang terdiri dari :
   - Sub Bagian Bina Program dan Keuangan
   - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari :
   - Kelompok Jabatan Fungsional
d. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
   - Kelompok Jabatan Fungsional
e. Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana terdiri dari :
   - Kelompok Jabatan Fungsional
f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :
   - Kelompok Jabatan Fungsional

https://jdih.pemalangkab.go.id

g. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
   - Kelompok Jabatan Fungsional
   - UPTD

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang

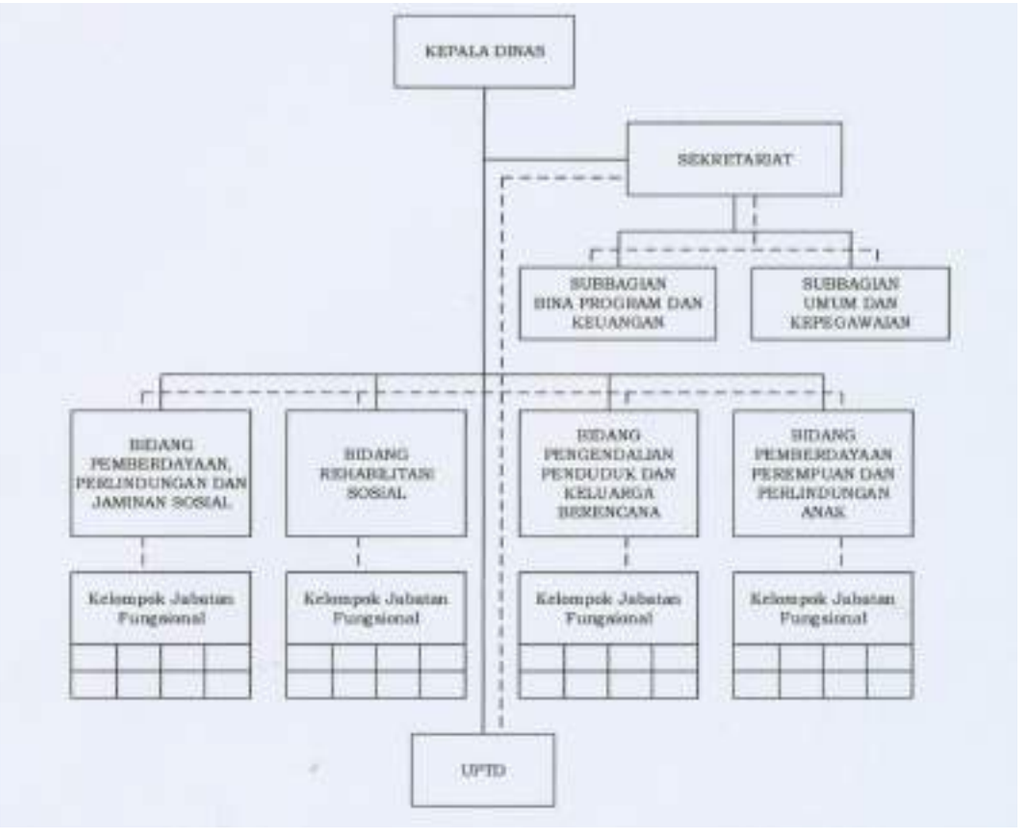

Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023

Sedangkan fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang adalah perumusan kebijakan sesuai dengan ruang lingkupnya (teknis di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak); pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya (pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak); pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya (penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak); pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya (koordinasi dan fasilitasi di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk,

https://jdih.pemalangkab.go.id

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak); pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati Pemalang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 tahun 2023 maka uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ,
2. Merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,
3. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
4. Mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan pedoman pelaksanaan agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
5. Merumuskan inovasi daerah urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan hasil analisa dan atau pemanfaatan teknologi guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
6. Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai kebutuhan pelayanan publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik,
7. Mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Perlindungan Anak sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi,

8. Mengarahkan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
9. Merumuskan laporan di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban Bupati,
10. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja, dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

B. Sekretaris

Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. Mengkoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,
3. Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
4. Menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
5. Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik,
6. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang perikanan sesuai dengan indikator

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka pengendalian internal kegiatan,

7. Menyusun konsep inovasi kesekretariatan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
8. Mengoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang-bidang guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
9. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
10. Mengoordinasikan penyusunan laporan urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan hasil laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

C. Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. Menyusun konsep kebijakan Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3. Menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
4. Menyusun konsep inovasi Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
5. Mengoordinasikan pelaksanaan bersama Jabatan Fungsional di Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
7. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

D. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. Menyusun konsep kebijakan Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3. Menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
4. Menyusun konsep inovasi Bidang Rehabilitasi Sosial berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
5. Mengoordinasikan pelaksanaan bersama Jabatan Fungsional di Bidang Rehabilitasi Sosial guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
7. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

E. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. Menyusun konsep kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3. Menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

https://jdih.pemalangkab.go.id

agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,

4. Menyusun konsep inovasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
5. Mengoordinasikan pelaksanaan bersama Jabatan Fungsional di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
7. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

F. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. Menyusun konsep kebijakan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3. Menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
4. Menyusun konsep inovasi Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
5. Mengoordinasikan pelaksanaan bersama Jabatan Fungsional di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
7. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang

Sumber daya Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang yang meliputi sumber daya manusia/kepegawaian dan sarana prasarana sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

a. Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Jumlah pegawai di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di bidang administrasi kependudukan tersaji dalam tabel berikut Tabel 2.1

Tabel 2.1
Pegawai Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang

No.	Uraian	Pendidikan					Jenis Kelamin										Jumlah	
		S 2	S 1	D3	SMA	Di bawah SMA	S2		S1		D3		SMA		Di bawah SMA			
							L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	-	-	-	-	1	-									1	
2.	Jabatan Administrasi																	
	1. Administrator	4	-	-	-	-	3	1									3	1
	2. Pengawas	2	1	-	-	-	1	1		1							1	2
	3. Pelaksana	1	13	2	3	-	1		4	9	1	1	3				9	10
3.	Jabatan Fungsional	2	3	1	-	-		2	1	2	1						2	4
4.	Non ASN		20	5	17	4			11	9	1	4	14	3	3	1	2	17
	Jumlah	10	37	8	20	4	6	4	16	21	3	5	17	3	3	1	45	34

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang, Juni 2025 (diolah)

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dukungan SDM Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang secara total per Juni 2025 adalah 33 orang PNS dan 46 orang tenaga bantu Honorer.

Proporsi gender di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang masih didominasi yaitu jumlah pegawai laki – laki 45 orang (56,96%) lebih banyak dibanding pegawai perempuan 34 orang (43,04%). Dalam Kategori Pendidikan Pegawai Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dapat dipetakan S2 (10 orang, 12,66%), diikuti dengan S1 (37 orang, 46,83%), DIII (8 orang, 10,13%), SLTA/sederajat (20 orang, 25,32%), dibawah SLTA (4 orang, 5,06%), dan paling sedikit dibawah SLTA yaitu sejumlah 4 orang (5,06%).

Dari aspek kualifikasi pendidikan masih terdapat pegawai yang belum memenuhi kualifikasi, namun karena faktor pengalaman kerja mereka memiliki kompetensi dalam jabatan yang diduduki sehingga tetap dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang.

Nilai Aset di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 16.612.553.498 dengan rincian sebagai berikut :

a. Sarana dan Prasarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik (B)	Rusak (R)	
	ALAT BESAR	**B**		**1**
1	- electric generating set lainnya (dst)	B		1

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik (B)	Rusak (R)	
	KOMPUTER	**B**		**278**
2	- P.C Unit	B		59
3	- Lap Top	B		75
4	- Note Book	B		10
5	- Hard Disk	B		3
6	- Monitor	B		2
7	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	B		119
8	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	B		2
9	- Peralatan Personal Komputer lainnya	B		6
10	- Modem	B		2
	ALAT ANGKUTAN	**B**		**122**
11	- Station Wagon	B		6
12	- Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	B		2
13	- Pick Up	B		2
14	- Sepeda Motor	B		110
15	- Mobil Unit Penerangan Darat	B		2
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	**B**		**1**
16	- perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	B		1
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	**B**		**940**
17	- Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	B		1
18	- Mesin Fotocopy Lainnya	B		1
19	- Lemari Besi/Metal	B		8
20	- Lemari Kayu	B		23
21	- Rak Besi	B		4
22	- Rak Kayu	B		14
23	- Filing Cabinet Besi	B		21
24	- Brandkas	B		2
25	- Lemari Kaca	B		2
26	- Papan Visual/Papan Nama	B		6
27	- White Board	B		18
28	- Alat Penghancur Kertas	B		2
29	- Mesin Absensi	B		2

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik (B)	Rusak (R)	
30	- Alat Pemotong Kertas	B		1
31	- LCD Projector/Infocus	B		12
32	- Papan Nama Instansi	B		2
33	- Alat Kantor Lainnya	B		65
34	- Kursi Besi/Metal	B		100
35	- Kursi Kayu	B		26
36	- Meja Rapat	B		29
37	- Meja 1/2 Biro	B		63
38	- Kursi Rapat	B		83
39	- Kursi Tamu	B		4
40	- Kursi Putar	B		6
41	- Kursi Biasa	B		5
42	- Bangku Tunggu	B		6
43	- Kursi Lipat	B		95
44	- Meja Komputer	B		1
45	- Sofa	B		2
46	- Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	B		5
47	- Alat Pembersih lainnya	B		6
48	- Lemari Es	B		3
49	- A.C. Window	B		10
50	- A.C. Split	B		28
51	- Kipas Angin	B		35
52	- Exhause Fan	B		23
53	- Kompor Gas (Alat Dapur)	B		2
54	- Tabung Gas	B		2
55	- Televisi	B		5
56	- Wireless	B		3
57	- Camera Video	B		2
58	- Dispenser	B		8
59	- Mimbar/Podium	B		1
60	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	B		44
61	- Alat Pemadam Kebakaran lainnya	B		5
62	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	B		1
63	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	B		4
64	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	B		12
65	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	B		58

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik (B)	Rusak (R)	
66	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	B		2
67	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	B		2
68	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	B		7
69	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	B		25
70	- Kursi Kerja Pejabat lainnya	B		40
71	- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	B		1
72	- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	B		2
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	**B**		**234**
73	- peralatan studio audio lainnya (dst)	B		1
74	- Camera Electronic	B		7
75	- Video Monitor	B		3
76	- Slide Projector	B		1
77	- Camera Film	B		1
78	- Layar Film/Projector	B		97
79	- peralatan studio gambar lainnya (dst)	B		1
80	- Telephone Mobile	B		120
81	- Facsimile	B		1
82	- Publik Address (Lapangan)	B		2
	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	**B**		**40**
83	- Alat Kesehatan Umum lainnya	B		40
JUMLAH				**1.616**

Sumber : *Buku Rekapitulasi Inventaris Tahun 2024*

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang terdiri dari gedung dinas. Kebutuhan ruangan kantor secara umum tersedia karena masing – masing bidang/seksi/subbagian sudah menempati kantor/ruang masing – masing. Kantor dinas dilengkapi dengan fasilitas 1 (satu) aula, mushola, gudang, ruang tamu, ruang ramah anak, toilet ramah gender di masing – masing bidang, namun belum memiliki ruang laktasi maupun toilet untuk disabilitas. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio Personal Computer dan/atau laptop dibanding jumlah pegawai yang ada

https://jdih.pemalangkab.go.id

di kantor induk mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang

Gambaran kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Berdasarkan Renstra Tahun 2021 – 2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Base Line	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Renstra Perangkat Daerah				Rasio Capaian Tahun 2021 s/d Tahun 2024 (%)			
						2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
A.	**TUJUAN PD**																	
1	Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai				NA	82	83	84	85	88,86	83,47	85,96	86,27	108,37	100,57	102,33	101,49
2	Persentase PMKS yang ditangani	%				10,21	12,76	15,32	17,87	20,42	62,69	44,58	74,22	66,6	491,30	290,99	415,33	326,15
3	IDG (Indek Pemberdayaan Gender)	Nilai				80,95	85,93	86,03	86,13	86,23	81,27	81,57	-	-	94,58	94,82	0,00	0,00
4	TFR	Angka				2,51	2,5	2,49	2,48	2,47	2,51	2,48	2,23	2,23	99,60	100,40	110,08	109,72
5	IPG					NA	82	83	84	85	86,49	86,72	87,14	87,37	105,48	104,48	103,74	102,79
6	LPP (laju Pertumbuhan Penduduk)					10,21	12,76	15,32	17,87	20,42	62,69	44,58	74,22	66,6	491,30	290,99	415,33	326,15
B.	**SASARAN PD**																	
1	Persentase penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Base Line	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Renstra Perangkat Daerah				Rasio Capaian Tahun 2021 s/d Tahun 2024 (%)			
						2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
2	Persentase Penduduk pada Tingkat Kesejahteraan 1 dan 2 yang mendapat pemberdayaan sosial, jaminan perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial	%				NA	41,06	49,27	57,48	65,7	65,96	64,29	37,44	30,93	160,64	130,49	65,14	47,08
3	Indeks PUG	Nilai				NA	0,79	0,8	0,81	0,82	0,8		0,81		101,27	0,00	100,00	0,00
4	Indeks KLA	Nilai				NA	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Madya	Madya	Nindya	Nindya
5	ASFR (15-19 tahun)	Angka				NA	35	35	34	34	35	21,2	21,8	21,2	100,00	139,43	135,88	137,65
6	IKG (indek ketimpangan gender)					0,370					0,441	0,425	0,378	0,380				
7	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)										55,37	58,34	62,08	62,77				
8	IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)					-					-	-	-	64,3				

https://jdih.pemalangkab.go.id

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Base Line	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Renstra Perangkat Daerah				Rasio Capaian Tahun 2021 s/d Tahun 2024 (%)			
						2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
9	Indeks Pencapaian SPM Sosial										100,00	100,00	100,00	100,00				
10	Persentase KPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya										100,00	100,00	100,00	100,00				
C.	**PROGRAM**																	
1	Nilai SAKIP	Nilai				NA	60	60,3	60,5	61	58,65	60,4	63,15	65,36	97,75	100,17	104,38	107,15
2	Nilai IRB	Nilai				NA	60	60,3	61	61,3	53,17	45,73	-	-	88,62	75,84	0,00	0,00
3	Persentase PSKS yang diberdayakan	%				NA	20,24	24,09	28,1	32,11	20,24	9,38	68,23	32,11	100,00	38,94	242,81	100,00
4	Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	%				NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar	%		V		17	17	34	51	68	100,00	100,00	100,00	100,00	588,24	294,12	196,08	147,06

https://jdih.pemalangkab.go.id

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Base Line	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Renstra Perangkat Daerah				Rasio Capaian Tahun 2021 s/d Tahun 2024 (%)			
						2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang di rehabilitasi																	
6	Persentase pemberinan jaminan perlindungan sosial pada penduduk yang terdaftar di Tingkat kesejahteraan 1 dan 2	%				NA	28,46	28,47	28,48	28,49	28,46	28,07	27,53	28,49	100,00	98,60	96,66	100,00
7	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	%		V		85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik.	%				NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Base Line	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Renstra Perangkat Daerah				Rasio Capaian Tahun 2021 s/d Tahun 2024 (%)			
						2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
9	Persentase PUS yang memiliki istri usia dibawah 20 tahun	%				NA	35	35	35	34	35	4,5	25,85		100,00	12,86	73,86	0,00
10	Angka Prevalensi Modern CPRm	%				NA	22,48	22,5	23	23,3	22,5	69,48	70,11	71,05	100,09	308,80	304,83	304,94
11	Cakupan PUS yang ber KB yang di berdayakan	%				NA	85,21	85,48	85,75	85,94	85,21	85,48	85,75	85,94	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%		V		NA	5	5,2	5,4	5,4	5	2,52	2,7	5,24	100,00	48,46	50,00	97,04
13	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%		V		NA	0,13	0,12	0,11	0,1	0,13	0,011	0,011	0,002	100,00	190,83	190,00	198,00
14	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%		V		NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Base Line	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Renstra Perangkat Daerah				Rasio Capaian Tahun 2021 s/d Tahun 2024 (%)			
						2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
15	ASFR (15-49) tahun	%		V		NA	35	35	34	34	35	21,2	21,8	21,2	100,00	139,43	135,88	137,65
16	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	%		V		NA	22,48	22,5	23	23,3	22,48	69,57	70,11	70,75	100,00	309,20	304,83	303,65
17	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%		V		NA	10,12	10,1	10,09	10,08	10,1	10,66	10,27	9,78	100,20	94,46	98,22	102,98

https://jdih.pemalangkab.go.id

Berdasarkan tabel 2.3 dapat diketahui bahwa secara umum kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dalam mencapai target kinerja dapat terlaksana, khususnya di tahun 2024 dari 26 kinerja terdapat 23 kinerja telah mencapai target dan 3 kinerja tidak mencapai target, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang yang mencapai target di tahun 2024 karena Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang yang semakin ditingkatkan dan Inovasi dalam meningkatkan dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat, Partisipasi, dukungan masyarakat terhadap program-program dan kegiatan yang ada di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang meliputi :
   a. Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM)
   b. Persentase PMKS yang ditangani
   c. IDG (Indek Pemberdayaan Gender)
   d. Persentase penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
   e. Persentase Penduduk pada Tingkat Kesejahteraan 1 dan 2 yang mendapat pemberdayaan sosial, jaminan perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial
   f. Indeks PUG
   g. Indeks KLA
   h. ASFR (15-19 tahun)
   i. Nilai SAKIP
   j. Nilai IRB
   k. Persentase PSKS yang diberdayakan
   l. Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani
   m. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang di rehabilitasi
   n. Persentase pemberinan jaminan perlindungan sosial pada penduduk yang terdaftar di Tingkat kesejahteraan 1 dan 2
   o. Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani
   p. Persentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik.
   q. Persentase PUS yang memiliki istri usia dibawah 20 tahun
   r. Angka Prevalensi Modern CPRm
   s. Cakupan PUS yang ber KB yang di berdayakan
   t. Persentase ARG pada belanja langsung APBD
   u. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten

https://jdih.pemalangkab.go.id

v. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)
w. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)
x. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

2. Kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang yang tidak mencapai target di tahun 2024, meliputi :
   a. IDG (Indek Pemberdayaan Gender) tidak mencapai target disebabkan Rendahnya Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif dan Eksekutif, Kesenjangan Partisipasi Perempuan dalam Dunia Kerja Formal, Angka partisipasi perempuan di pendidikan tinggi tertinggal di beberapa wilayah, terutama di daerah tertinggal dan pedesaan, Kekerasan terhadap Perempuan dan Diskriminasi dan Kelemahan Koordinasi dan Komitmen Lintas Sektor.
   b. Persentase Penduduk pada Tingkat Kesejahteraan 1 dan 2 yang mendapat pemberdayaan sosial, jaminan perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial tidak mencapai target disebabkan oleh Basis Data Tidak Akurat atau Tidak Terkini, Penduduk Rentan Tidak Terjangkau oleh Program, Minimnya Anggaran dan Sumber Daya dan Lemahnya Koordinasi Antarsektor dan Antara Pemerintah Pusat-Daerah
   c. Nilai IRB tidak mencapai target disebabkan Roadmap reformasi birokrasi tidak diimplementasikan secara nyata, Sasaran dan indikator kinerja belum SMART, SOP belum diterapkan secara konsisten, Belum optimalnya pelaksanaan merit system (rekrutmen, mutasi, promosi berbasis kinerja), Inovasi layanan masih minim dan Pengendalian gratifikasi, benturan kepentingan, dan integritas belum dijalankan maksimal
   d. Persentase PUS yang memiliki istri usia dibawah 20 tahun tidak mencapai target disebabkan Masih Tingginya Perkawinan Usia Anak, Anak perempuan yang tidak melanjutkan sekolah cenderung lebih cepat menikah dan masuk usia subur lebih awal, Remaja dan orang tua kurang mendapatkan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan risiko menikah muda, PUS dengan istri usia <20 tahun sering tidak mendapatkan konseling KB atau akses kontrasepsi karena dianggap belum cukup umur atau tabu, dan Lemahnya kolaborasi antara sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, dan kependudukan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.4
Pencapaian Anggaran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Berdasarkan Renstra Tahun 2021 – 2024

NO.	URAIAN	PAGU INDIKATIF PD PADA TAHUN (Rp.)				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN Tahun KE-				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024						
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
		36.715.002.000	34.858.060.000	34.938.000.000	35.023.000.000	29.095.587.705	32.535.112.969	31.100.819.840	37.972.973.376	79,25	93,34	89,02	108,42	-1,21%	0,17%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.647.567.400	4.706.000.000	4.706.000.000	4.706.000.000		4.944.996.499	4.451.073.870	4.881.959.826	0,00	105,08	94,58	103,74	-5,00%	0,00%
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	715.646.300	720.000.000	725.000.000	730.000.000	430.777.800,00	616.326.500	382.586.600	641.772.648	60,19	85,60	52,77	87,91	0,49%	0,51%
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	5.000.000	6.000.000	15.000.000	20.000.000	300.000,00	3.638.900	300.000	0	6,00	60,65	2,00	0,00	25,42%	21,25%
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	961.526.500	1.152.560.000	1.155.000.000	1.155.000.000	649.896.654,00	906.634.302	1.005.680.987	9.208.878.766	67,59	78,66	87,07	797,31	4,20%	0,16%
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	13.295.199.900	13.300.000.000	13.305.000.000	13.310.000.000	10.453.727.900,00	8.401.975.900	5.573.105.080	4.030.315.500	78,63	63,17	41,89	30,28	0,03%	0,03%
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	209.691.900	210.000.000	215.000.000	220.000.000	193.840.800,00	128.933.700	62.369.600	38.895.000	92,44	61,40	29,01	17,68	1,19%	1,71%

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO.	URAIAN	PAGU INDIKATIF PD PADA TAHUN (Rp.)				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN Tahun KE-				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024						
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	67.845.900	100.000.000	105.000.000	110.000.000	32.272.800,00	40.974.500	34.903.600	33.915.000	47,57	40,97	33,24	30,83	10,37%	3,41%
8	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	737.492.000	650.000.000	650.000.000	675.000.000	543.710.000,00	264.486.000	229.511.000	839.977.883	73,72	40,69	35,31	124,44	-2,44%	1,11%
9	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.014.881.100	815.000.000	820.000.000	825.000.000	877.513.739,00	183.787.861	124.763.405	335.164.495	86,46	22,55	15,22	40,63	-5,83%	0,30%
10	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	145.000.000	141.500.000	150.000.000	150.000.000	80.607.000,00	168.544.000	144.684.742	436.557.108	55,59	119,11	96,46	291,04	0,80%	2,98%
11	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	55.000.000	75.000.000	80.000.000	85.000.000	30.713.000,00	49.982.100	19.000.000	14.450.000	55,84	66,64	23,75	17,00	9,70%	4,42%
12	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	148.825.000	160.000.000	170.000.000	175.000.000	74.691.200,00	155.919.000	115.359.000	383.536.480	50,19	97,45	67,86	219,16	3,93%	2,88%
13	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	151.175.000	170.000.000	175.000.000	180.000.000	78.592.000	106.897.000	66.655.500	146.578.092	51,99	62,88	38,09	81,43	4,18%	2,08%
14	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	948.048.300	2.330.000.000	2.335.000.000	2.340.000.000	693.248.000,00	657.117.000	10.658.074.394	9.633.381.540	73,12	28,20	456,45	411,68	14,93%	0,16%

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO.	URAIAN	PAGU INDIKATIF PD PADA TAHUN (Rp.)				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN Tahun KE-				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024						
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
15	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	9.481.750.400	8.000.000.000	8.005.000.000	8.010.000.000	8.012.278.642,00	13.071.969.928	5.222.769.000	3.163.632.000	84,50	163,40	65,24	39,50	-4,60%	0,05%
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.100.182.300	1.050.000.000	1.055.000.000	1.060.000.000	768.500.300,00	1.043.622.900	1.627.029.500	1.574.434.700	69,85	99,39	154,22	148,53	-0,96%	0,35%

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.1. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang

Permasalahan adalah gambaran bentuk kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Perumusan permasalahan merupakan dasar untuk merumuskan strategi, arah kebijakan dan kinerja perangkat daerah. Perumusan permasalahan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam pengelolaan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan pada tahun sebelumnya sesuai kewenangan yang dimilikinya. Permasalahan yang ada merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat ini. Suatu permasalahan dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan langsung dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang dilakukan dengan menyusun pohon masalah dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya peran perempuan dalam pembangunan	Masih adanya kesenjangan gender di bidang kehidupan	Belum optimalnya implementasi kebijakan PUG
			Belum optimalnya implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di OPD
			Masih terdapat ketimpangan gender dalam bidang pendidikan, kesehatan, politik dan ekonomi yang menjadi indikator pembangunan gender
			Belum optimalnya kualitas dan kuantitas data dan informasi pilah gender diberbagai level

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Masih rendahnya proporsi belanja anggaran responsif gender dibanding total pagu yang ada baik di perangkat daerah maupun APBD secara keseluruhan
2	Belum optimalnya implementasi pemenuhan hak anak didaerah	Komitmen pengambil kebijakan didaerah masih kurang	Belum semua stakeholder (OPD) paham terkait regulasi Kabupaten/Kota Layak Anak
			Implementasi Pengarusutamaan hak anak belum menjadi isu prioritas dan strategis bagi Lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha
			Belum optimalnya partisipasi anak dalam pembangunan di berbagai level mulai dari desa, kecamatan hingga tingkat Kabupaten/Kota
			Belum adanya sistem pelibatan anak dalam forum pengambilan keputusan secara berjenjang dan integratif
4	Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Semakin banyaknya jenis kasus kekerasan dan perundungan perempuan dan anak	Sebagian besar Layanan penanganan kekerasan perempuan dan anak didaerah masih terpusat pada level Kabupaten/Kota
			Belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak lintas sektor
			Belum optimalnya implementasi sistem perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat didaerah
			Belum optimalnya perlindungan bagi anak kelompok rentan sebagai upaya pengurangan resiko
			Belum optimalnya sinergitas Lembaga penyedia layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
			Belum memadai sarana dan prasarana UPTD PPA serta masih terbatasnya kapasitas SDM penyedia layanan yang ada

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
5	Belum optimalnya pembangunan kependudukan di daerah	Belum semua Kabupaten/Kota yang menyusun dan mengintegrasikan kedalam dokumen perencanaan	Belum optimalnya advokasi pemanfaatan GDPK 5 pilar di Kabupaten/Kota
			Masih rendahnya komitmen pengambil kebijakan di Kabupaten/ Kota untuk menyusun GDPK 5 pilar
			Belum semua satuan pendidikan jenjang SMA/SMK membentuk Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)
6	Masih rendahnya Kepesertaan KB Pasangan Usia Subur	Masih rendahnya kepesertaan KB MKJP.	Kurangnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada masyarakat karena keterbatasan jumlah tenaga penyuluh KB dilapangan,
			Masih terbatasnya layanan KB gratis bagi masyarakat kurang mampu terutama didaerah pedesaan atau terpencil
			Kurangnya motivasi dan ketrampilan Kader PPKBD, Sub PPKBD dalam memberikan KIE KB
7	Belum optimalnya peran kelembagaan kelompok Tribina (BKB, BKR dan BKL) dalam mendukung peningkatan Ketahanan Keluarga.	Masih kurangnya peran aktif kader kelompok Tribina (BKB, BKL dan BKR) dalam membina anggota kelompoknya	Advokasi dan pendampingan bagi kader kelompok Tribina (BKB, BKL dan BKR) belum optimal
8	Belum optimalnya peran kader dan kelompok UPPKA dalam mendorong peningkatan pendapatan keluarga keluarga	Masih rendahnya kapasitas kader dan anggota kelompok UPPKA dalam menciptakan wirausaha mandiri	Masih rendahnya pelatihan ketrampilan ekonomi kader dan anggota UPPKA, terbatasnya akses sumber permodalan, kualitas produksi pemasaran dan kemasan produk hasil anggota UPPKA masih belum optimal
9	Belum optimalnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Belum optimalnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Belum optimalnya layanan administrasi perkantoran, sarana prasarana, informasi layanan publik dan keuangan perangkat daerah
10	Penanganan Sosial PPKS Belum Optimal	Rehabilitasi Sosial PPKS Belum Memenuhi Standar Kualitas SPM	1. Ketersediaan Sarpras Rumah Singgah Belum Memadai 2. Kompetensi SDM Rumah Singgah Belum Memadai

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Pemenuhan Kebutuhan Dasar PM Panti Belum Memadai
		Belum Terpenuhinya Jaminan Sosial Bagi PPKS Yang Layak dan Tepat Sasaran	1. Data Sasaran Penanganan PPKS Tersedia Belum Valid 2. Pendampingan Sosial Belum Optimal
		Belum Terpenuhinya Perlindungan Sosial Korban Bencana pada Saat dan pascaTanggap Darurat	1. Belum Tercukupinya Pemenuhan Logistik Bencana 2. Belum Optimalnya Pendampingan Psikososial 3. Kurangnya Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan
		Kurangnya Kemandirian Sosial PPKS Yang Berkualitas	1. Ketersediaaan Data Sasaran Program PPKS Tersedia Belum Valid 2. Konsistensi Pendampingan PPKS Belum Optimal PPKS Belum Mampu Mengelola Bantuan Dengan Baik
		Kurangnya Peran Serta PSKS Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	1. Sarpras Operasional Belum Memadai 2. Bimbingan Teknis Pekerjaan Sosial Bagi PSKS Belum Optimal 3. Kurangnya Kemitraan dengan Dunia Usaha 4. Kurangnya peran serta pihak luar dalam Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan serta Kesetiakawan Sosial

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.1.1. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu strategis dapat dirumuskan melalui simpulan dari permasalahan perangkat daerah yang merupakan hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, isu strategis lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) yang menjadi tantangan perangkat daerah kedepan yang bersumber dari sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah, implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah, hasil penjaringan masukan *stakeholder* oleh perangkat daerah serta potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang dirumuskan dengan memperhatikan potensi dan permasalahan serta mempertimbangkan isu KLHS, isu strategis global, nasional, dan regional sebagai berikut :

1. Masih tingginya ketimpangan gender
2. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Masih tingginya angka kelahiran
4. Belum Optimalnya Kualitas Ketahanan Keluarga
5. Belum optimalnya PPKS yang ditangani

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.6
Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PUSPAGA	Belum optimalnya peran perempuan dalam pembangunan	Masih tingginya kemiskinan pada kelompok rentan yaitu perempuan, anak, kaum marginal dan difabel Kaum Perempuan merupakan kaum rentan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan perubahan iklim	Kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	Pemberdayaan perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Pemberdayaan perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Masih tingginya ketimpangan gender
UPTD	Belum optimalnya implementasi pemenuhan hak anak didaerah	Belum meratanya akses pendidikan dan kesehatan yang berpengaruh terhadap kualitas hidup manusia	Perlindungan dari kekerasan terhadap anak, serta akses yang sama terhadap keadilan.	Pemberdayaan perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Pemberdayaan perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Masih tingginya kasus kekerasan terhadap

https://jdih.pemalangkab.go.id

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
						perempuan dan anak
	Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Masih adanya ketimpangan gender dan hak-hak anak	Kesetaraan gender dan memberday akan semua perempuan dan anak	Kekerasan terhadap perempuan serta menghindari perkawinan usia anak	Pemberdayaan perempuan dan anak serta kesetaraan gender	
GDPK	Masih rendahnya Kepesertaan KB Pasangan Usia Subur	Belum optimalnya pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif	TFR pada beberapa negara maju di Dunia	TFR di Indonesia	TFR di beberapa kabupaten/ kota di Jawa Tengah	Masih tingginya angka kelahiran

https://jdih.pemalangkab.go.id

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
SEKOLAH LANSIA	Belum optimalnya peran kelembagaan kelompok Tribina (BKB, BKR dan BKL) dalam mendukung peningkatan Ketahanan Keluarga.	Belum optimalnya pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif	Pembangunan dan Kualitas Ketahanan Keluarga	Peran dan fungsi dari Kelompok Tribina yang telah terbentuk.	Peran dan fungsi dari Kelompok Tribina yang telah terbentuk.	Belum Optimalnya Kualitas Ketahanan Keluarga
Rumah Singgah	Belum Optimalnya Penanganan Sosial PPKS	Masih tingginya kemiskinan pada kelompok rentan yaitu perempuan, anak, kaum marginal dan difabel Kaum Perempuan merupakan kaum rentan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan perubahan iklim	Penanganan Penanggulangan Kemiskinan	Pemberdayaan dan Peningkatan Pendapatan Keluarga	Pemberdayaan dan Peningkatan Pendapatan Keluarga	Belum optimalnya PPKS yang ditangani

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Pemalang dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk periode RPJMD Tahun 2025-2029 adalah **"PEMALANG BERCAHAYA (Bersih, Cakap, Handal dan Mulya)"**.

Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2025-2029. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapain visi daerah, dan menjadi pedoman stakeholder terkait, untuk merumuskannya ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan.

Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya, Visi ini memiliki pembentuk kata :

1. **Bersih** Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan
2. **Cakap** dimaknai memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
3. **Handal** dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.
4. **MULYA** Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 menyebutkan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk

https://jdih.pemalangkab.go.id

mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029.

Misi dalam perencanaan pembangunan memiliki beberapa fungsi, antara lain: mengarahkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai visi, mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan ke dalam satu kesatuan yang utuh, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka mencapai visi, berikut ini misi RPJMD 2025-2029 berdasarkan misi Kepala Daerah Kabupaten Pemalang yang terpilih yaitu **RHAPSODI (Resik, Hijau,Apik, Peduli, Silaturahmi, Organisatoris, Digitalisasi dan Ikhlas)**, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Resik**: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih
2. **Hijau**: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yg berkelanjutan
3. **Apik**: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah
4. **Peduli**: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat
5. **Silaturahmi**: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong,tepa selira dan sejahtera
6. **Organisatoris**: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi
7. **Digitalisasi**: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar
8. **Ikhlas**: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan Sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang mendukung pencapaian Visi Ke-**2 "Cakap"** dan Visi Ke-**4 "Mulya"** sedangkan untuk misi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang mendukung **Misi ke-4 "Peduli"** dan **Misi ke-5 "Silaturahmi"** Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang adalah:

1. Tujuan ke-3 **"Meningkatnya daya saing pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan"**
2. Tujuan ke-4 **"Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat"**

https://jdih.pemalangkab.go.id

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka perlu ditetapkan sasaran jangka menengah. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

3.2. Sasaran Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program, yang dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan serta disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis serta memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable relevant, time bond* dan *continously improve* (SMART-C). Sasaran Renstra menjadi dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah.

Untuk mencapai tujuan Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang mempunyai 4 (empat) sasaran jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2025–2029, yaitu :

1. **“Meningkatnya kualitas pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial pada PPKS ”** yang diukur dengan indikator Persentase PPKS yang ditangani, merupakan ukuran pencapaian SPM Sosial dan KPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya yang merupakan hasil dari bentuk Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang kepada masyarakat penerima manfaat.
2. **“Meningkatnya kualtas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak**” yang diukur dengan indikator sebagai berikut :
   - **IKG (indek ketimpangan gender)** dan **Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), dimana IKG (indek ketimpangan gender)** merupakan ukuran yang mengukur tingkat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar tenaga kerja.

https://jdih.pemalangkab.go.id

- **Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)** adalah penilaian yang mengacu pada sistem pembangunan berbasis hak anak, yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak. KLA dinilai berdasarkan 31 indikator yang mengacu pada Konvensi Hak Anak (KHA) dan peraturan perundang-undangan terkait anak. Bahwa setiap anak di suatu wilayah mendapatkan hak-haknya terpenuhi, terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

3. **"Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk"** yang diukur dengan indikator sebagai berikut :
   - **TFR (Angka Kelahiran Total)**, **Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)** dan **IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)**, dimana **TFR** merupakan indikator demografi yang mengukur rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa suburnya (biasanya usia 15-49 tahun) jika ia hidup hingga akhir masa subur dan mengikuti pola kelahiran saat ini. TFR yang tinggi dapat mengindikasikan pertumbuhan penduduk yang pesat, sedangkan TFR yang rendah dapat menunjukkan pertumbuhan penduduk yang lambat atau bahkan penurunan.
   - **IBangga** merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas keluarga di Indonesia. Indeks ini mengukur tiga dimensi utama yaitu ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, yang masing-masing diwakili oleh beberapa indikator dan variabel.
   - **IPBK** adalah indeks komposit yang mengukur sejauh mana pembangunan suatu wilayah telah memperhatikan aspek kependudukan. IPBK menjadi indikator untuk melihat integrasi isu kependudukan, seperti pertumbuhan, persebaran, kualitas, dan mobilitas penduduk, dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan kata lain, IPBK mencerminkan bagaimana penduduk menjadi fokus utama, baik sebagai subjek maupun objek, dalam proses pembangunan. IPBK mengukur lima dimensi pembangunan berwawasan kependudukan, yaitu:
     a. Partisipasi: Seberapa besar penduduk terlibat dalam proses pembangunan.
     b. Keberlanjutan: Sejauh mana pembangunan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya kependudukan.
     c. Pemihakan: Seberapa besar pembangunan berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

https://jdih.pemalangkab.go.id

d. Integrasi: Sejauh mana isu kependudukan terintegrasi dalam berbagai sektor pembangunan.
e. Kesetaraan: Sejauh mana pembangunan memberikan kesempatan yang sama bagi semua penduduk.

IPBK juga berkaitan erat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan IPBK, yang berarti pembangunan yang lebih berwawasan kependudukan, diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan IPM, yang merupakan indikator keberhasilan pembangunan.

4. "**Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan**" yang diukur dengan indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** yang merupakan hasil survei kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi kepegawaian yang telah dilaksanakan. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian merupakan langkah penting untuk mewujudkan meritokrasi. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, maka sistem merit dapat diterapkan secara lebih efektif.

Keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dapat digambarkan sebagai berikut :

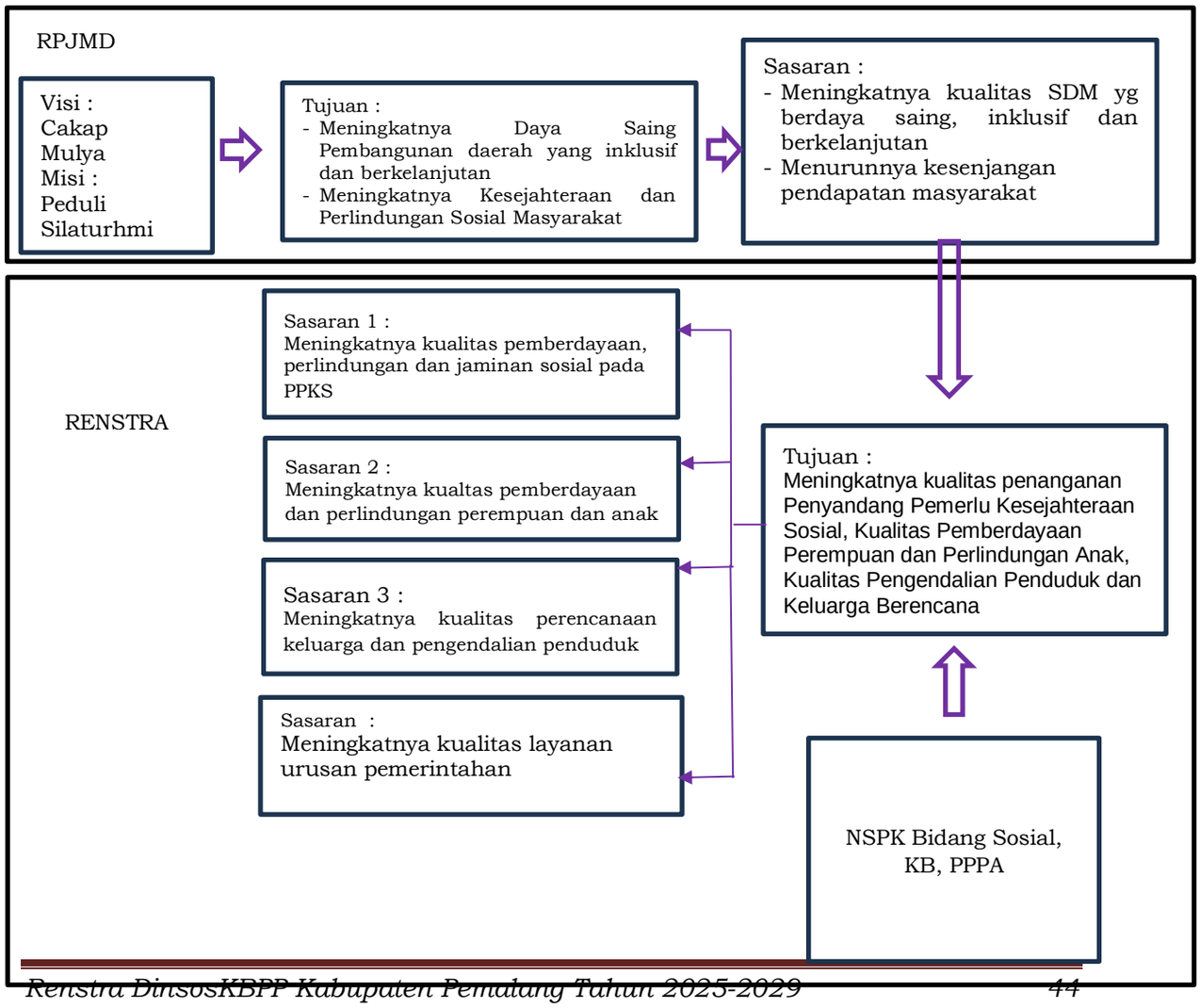

https://jdih.pemalangkab.go.id

Gambar 3.1
Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra

Selanjutnya rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Target Tahun						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat	Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		% PPKS yang ditangani	%	68	70	72	73	75	75	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial pada PPKS	Indeks pencapaian SPM Sosial	Indeks	100	100	100	100	100	100	
			% KPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,00	86,05	86,10	86,15	86,20	86,25	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Target Tahun						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Maningkatnya kualitas SDM yg berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		IPG	Indeks	87,45	87,5	87,55	87,6	87,65	87,7	
		Meningkatnya kualtas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	IKG (indek ketimpangan gender)	Indeks	0,380	0,390	0,380	0,370	0,360	0,350	
			Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	Nindya	Nindya (780)	Utama (820)	Utama (850)	Utama (880)	Utama (900)	
	Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		LPP (laju Pertumbuhan Penduduk)	%	1,23	1,22	1,21	1,2	1,19	1,18	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Target Tahun						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jiwa	2,12	2,11	2,10	2,10	2,10	2,10	
			Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Indeks	62	64	66	68	70	72	
			IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	Angka	65,1	65,9	66,7	67,5	68,3	69,1	

https://jdih.pemalangkab.go.id

3.3 Strategi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program yang bersifat indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dan merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan yang telah ditetapkan yang dijabarkan dalam kebijakan dan program. Strategi diperlukan dalam memanajemen setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai sebuah kesatuan cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang memiliki.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran, strategi dijabarkan dalam arah kebijakan dalam pencapaian pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, yang dikembangkan dengan prinsip untuk dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang, memenuhi kebutuhan layanan yang berbeda tiap *segment* pengguna layanan dan pemangku kepentingan, bernilai tambah dan berkelanjutan, dengan tahapan penentuannya yang meliputi :

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan dan isu-isu strategis;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi;
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*);
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran.

Strategi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, meliputi:

1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial pada PPKS. Pencapaian sasaran ini diarahkan melalui strategi :
   a. Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Sosial Keluarga Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE);

https://jdih.pemalangkab.go.id

b. Meningkatkan penanganan PPKS melalui peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan masyarakat baik PSKS, LKS, LK3, pemberian akses pendidikan dan kesehatan bagi penduduk miskin dan pelayanan kesejahteraan sosial (PKH, BST) peningkatan kualitas data kemiskinan (DTSEN), penanganan PPKS wajib sebagaimana SPM Permensos 6 tahun 2019, pemberian jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan dan rehabilitasi Sosial, dan perbaikan taman makam pahlawan.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya kualtas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak. Pencapaian sasaran ini diarahkan melalui strategi :
   a. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender melalui peningkatan anggaran yang responsif gender, pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial hukum dan politik, perlindungan perempuan dari kekerasan dan TPPO dengan memperkuat ketahanan keluarga dan pemberian pelayanan terhadap korban kekerasan, peningkatan pemahaman masyarakat untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan;
   b. Peningkatan pemenuhan hak anak melalui peningkatan kebutuhan anak bidang pendidikan, kesehatan, alternatif bermain, penguatan sekolah ramah anak, kelurahan/desa ramah anak, perlindungan anak dari korban kekerasan dan perlindungan pada anak berkebutuhan khusus;
   c. Mendorong Kecamatan Berdaya di Kabupaten Pemalang;
   d. Menguatkan implementasi PUG di berbagai aspek melalui pelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan, peningkatan peran keluarga dalam pemenuhan hak perempuan, serta optimalisasi penyediaan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan;
   e. Meningkatkan upaya pengurangan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui KIE, penguatan kerjasama kelembagaan dan partisipasi masyarakat, serta penguatan layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO;
   f. Meningkatkan upaya pengurangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan peningkatan perlindungan khusus anak melalui KIE, penguatan kerjasama kelembagaan dan partisipasi masyarakat, serta penguatan layanan bagi anak korban kekerasan termasuk TPPO;
   g. Meningkatkan pemenuhan hak anak melalui advokasi dan koordinasi lintas sektor;
   h. Meningkatkan kualitas pembangunan kependudukan, ketahanan keluarga serta mendorong peran serta lembaga dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk. Pencapaian sasaran ini diarahkan melalui strategi :
   a. Pengendalian penduduk dan peningkatan pelayanan keluarga berencana melalui penyusunan grand desain kependudukan, implementasi kebijakan dengan advokasi, penetapan generasi remaja yang sehat, peningkatan usia perkawinan, peningkatan KIE. pemberian alat

https://jdih.pemalangkab.go.id

kontrasepsi pada PUS yang telah memiliki anak lebih dari 2 dan PUS yang memiliki resiko tinggi, peningkatan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang dan peningkatan kelembagaan BKB, BKR dan BKL

4. Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pelayanan urusan pemerintahan. Pencapaian sasaran ini diarahkan melalui strategi :
   a. Pencapaian sasaran ini diarahkan melalui strategi memperbaiki pelayanan yang diberikan dengan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi atas hasil survei kepuasan masyarakat.

Selanjutnya pentahapan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang selama kurun waktu tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Kesadaran pentingnya pencegahan perkawinan anak/perkawinan minimal 19 tahun serta edukasi kepada Calon Pengantin (Catin)	Mendorong Komitmen Kabupaten dalam Implementasi Kecamatan Berdaya, Kampung KB Mandiri dan berkelanjutan serta bersinergi dengan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)	Peningkatan kualitas penyaluran Bantuan Jaminan Sosial yang tepat sasaran dalam upaya pemenuhan Basic Need Access bagi PPKS	Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Terwujudnya Kualitas Penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

3.4 Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya juga merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan/sub kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan berguna untuk menjamin ketercapaian, kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan dan mengantisipasi isu strategis, yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi, yang

https://jdih.pemalangkab.go.id

memberikan arahan dan panduan hasil rumusan strategi yang dipilih agar lebih optimal dalam mencapai tujuan dan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun mendukung pencapaian sasaran daerah dengan memperhitungkan dan antisipasi terhadap semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul.

Melalui strategi dan arah kebijakan maka akan terumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan tujuan daerah dan sasaran perencanaan pembangunan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. Selain itu, strategi dan arah kebijakan juga merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Dalam menentukan arah kebijakan Renstra, perlu mendasari pada NSPK dan arah kebijakan RPJMD. Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1. Penyusunan dan Pelaksanaan Program Kerja 2. Advokasi dan penggerakan program KB kepada masyarakat 3. Standar pelayanan KB yang berkualitas 4. Pembinaan terhadap peserta KB 5. Pedoman dalam melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program KB 6. Penyuluhan dan Penggerakan 7. Pemanfaatan data dan informasi kependudukan	Peningkatan Pengendalian penduduk untuk mewujudkan generasi yang berkualitas melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam ber KB dan kualitas keluarga sejahtera	1. Menyusun Kebijakan Kependudukan GDPK (5 Tahun) 2. Meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi yang rasional, efisian dan efektif, menurunkan angka unmed need (ingin adan ditunda dan tidak ingin anak lagi) 3. Mengembangkan kemitraan dengan organisasi kepemudaan, sekolah Toga/Toma dalam sosialisasi pendewasaan usia perkawinan 4. Melakukan sosialisasi, pelatihan dan sarasehan terkait manajemen keluarga 5. Meningkatkan kualitas kelompok Ketahanan Keluarga (BKB, BKL, BKR, PIK-R, UPPKS) dan meningkatkan pertisipasi masyarakat untuk mengikuti kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	1. Pedoman pelaksanaan perlindungan anak 2. Pemberdayaan Perempuan 3. Pengarusutamaan Gender 4. Peningkatan Kualitas Keluarga 5. Penguatan Kelembagaan	Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dan pemenuhan hak anak difokuskan pada perlindungan perempuan dan anak serta pengaurusutamaan gender	1. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak serta penghapusan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dan mengeliminir berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak 2. Melakukan sosialisasi, pelatihan terkait industri rumahan dan pencegahan terjadinya kesenjangan ekonomi terhadap perempuan 3. Melakukan pelatihan terkait PPRG (Perencanaan Penggaran Responsif Gender) 4. Peningkatan dan optimalisasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan khususnya di sektor-sektor strategis 5. Peningkatan upaya perlindungan kepada perempuan dengan prioritas pada upaya preventif tindakan kekerasan terhadap perempuan melalui Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kecamatan 6. Peningkatan upaya perlindungan anak dan perlindungan khusus anak dengan prioritas pada upaya preventif tindakan kekerasan terhadap anak melalui Rumah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kecamatan 7. Penguatan kerjasama dan kemitraan dalam pemenuhan hak-hak anak di berbagai sektor	
3	1. Penyusunan SOP Rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan korban penyalahgunaan narkoba 2. Penyusunan SOP pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin, korban bencana, dan kelompok rentan lainnya 3. Pemberdayaan Masyarakat 4. Penyusunan SOP Pelayanan sosial, baik di dalam maupun di luar panti, untuk lanjut usia, anak-anak, dan penyandang disabilitas	Peningkatan penanganan PPKS melalui jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi, kerjasama intervensi lintas sektor dan swasta dengan memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	1. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin dalam upaya peningkatan sustainable livelihood bagi PPKS 2. Meningkatkan kualitas Tata kelola Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan melalui Peningkatan Koordinasi antar stakeholder 3. Pemberdayaan PPKS melalui bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan stimulant 4. Peningkatan kualitas pelaksanaan Rehabilitasi sosial bagi PPKS dalam Panti (Pemerintah dan Swasta) secara holistik,	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			sistematis dan terstandar 5. Meningkatkan kualitas penyaluran Bantuan Jaminan Sosial yang tepat sasaran dalam upaya pemenuhan Basic Need Access bagi PPKS 6. Peningkatan penanganan korban bencana melalui penyediaan logistik bencana yang memadai, pendampingan psikososial dan penanganan khusus kelompok rentan 7. Peningkatan peran serta masyarakat /PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 8. Pemutakhiran Data Kesejahteraan Sosial (DTSEN) 9. Penyediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang efektif dan obyektif serta administrasi keuangan yang akuntabel 10. Penyediaan administrasi kepegawaian, administrasi umum, sarana prasarana kantor serta jasa penunjang untuk memperlancar pelaksanaan tugas	

Dari uraian di atas dapat disimpulkan rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.4

Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya kualitas pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial pada PPKS	a. Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Sosial Keluarga Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE); b. Meningkatkan penanganan PPKS melalui peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan masyarakat baik PSKS, LKS, LK3, pemberian akses pendidikan dan kesehatan bagi penduduk miskin dan pelayanan kesejahteraan sosial (PKH, BST) peningkatan kualitas data kemiskinan (DTSEN), penanganan PPKS wajib sebagaimana SPM Permensos 6 tahun 2019, pemberian jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan dan rahabilitasi Sosial, dan perbaikan taman makam pahlawan.	a. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin dalam upaya peningkatan sustainable livelihood bagi PPKS b. Meningkatkan kualitas Tata kelola Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan melalui Peningkatan Koordinasi antar stakeholder c. Pemberdayaan PPKS melalui bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan stimulant d. Peningkatan kualitas pelaksanaan Rehabilitasi sosial bagi PPKS dalam Panti (Pemerintah dan Swasta) secara holistik, sistematis dan terstandar e. Meningkatkan kualitas penyaluran Bantuan Jaminan Sosial yang tepat sasaran dalam upaya pemenuhan Basic Need Access bagi PPKS f. Peningkatan penanganan korban bencana melalui penyediaan logistik bencana yang memadai, pendampingan psikososial dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			penanganan khusus kelompok rentan g. Peningkatan peran serta masyarakat /PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial h. Pemutakhiran Data Kesejahteraan Sosial (DTSEN) i. Penyediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang efektif dan obyektif serta administrasi keuangan yang akuntabel j. Penyediaan administrasi kepegawaian, administrasi umum, sarana prasarana kantor serta jasa penunjang untuk memperlancar pelaksanaan tugas
	Meningkatnya kualtas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	a. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender melalui peningkatan anggaran yang responsif gender, pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial hukum dan politik, perlindungan perempuan dari kekerasan dan TPPO dengan memperkuat ketahanan keluarga dan pemberian pelayanan terhadap korban kekerasan, peningkatan pemahaman masyarakat untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan; b. Peningkatan pemenuhan hak anak melalui peningkatan kebutuhan anak bidang pendidikan, kesehatan,	a. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak serta penghapusan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dan mengeliminir berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak b. Melakukan sosialisasi, pelatihan terkait industri rumahan dan pencegahan terjadinya kesenjangan ekonomi terhadap perempuan c. Melakukan pelatihan terkait PPRG (Perencanaan Penggaran Responsif Gender) d. Peningkatan dan optimalisasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan khususnya di sektor-sektor strategis e. Peningkatan upaya perlindungan kepada perempuan dengan prioritas pada upaya preventif tindakan kekerasan terhadap

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		alternatif bermain, penguatan sekolah ramah anak, kelurahan/desa ramah anak, perlindungan anak dari korban kekerasan dan perlindungan pada anak berkebutuhan khusus; c. Mendorong Kecamatan Berdaya di Kabupaten Pemalang; d. Menguatkan implementasi PUG di berbagai aspek melalui pelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan, peningkatan peran keluarga dalam pemenuhan hak perempuan, serta optimalisasi penyediaan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan; e. Meningkatkan upaya pengurangan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui KIE, penguatan kerjasama kelembagaan dan partisipasi masyarakat, serta penguatan layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO; f. Meningkatkan upaya pengurangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan peningkatan perlindungan khusus anak melalui KIE, penguatan kerjasama kelembagaan dan	perempuan melalui Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kecamatan f. Peningkatan upaya perlindungan anak dan perlindungan khusus anak dengan prioritas pada upaya preventif tindakan kekerasan terhadap anak melalui Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kecamatan g. Penguatan kerjasama dan kemitraan dalam pemenuhan hak-hak anak di berbagai sektor

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		partisipasi masyarakat, serta penguatan layanan bagi anak korban kekerasan termasuk TPPO; g. Meningkatkan pemenuhan hak anak melalui advokasi dan koordinasi lintas sektor; h. Meningkatkan kualitas pembangunan kependudukan, ketahanan keluarga serta mendorong peran serta lembaga dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
	Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk	a. Pengendalian penduduk dan peningkatan pelayanan keluarga berencana melalui penyusunan grand desain kependudukan, implementasi kebijakan dengan advokasi, penetapan generasi remaja yang sehat, peningkatan usia perkawinan, peningkatan KIE. pemberian alat kontrasepsi pada PUS yang telah memiliki anak lebih dari 2 dan PUS yang memiliki resiko tinggi, peningkatan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang dan peningkatan kelembagaan BKB, BKR dan BKL	a. Menyusun Kebijakan Kependudukan GDPK (5 Tahun) b. Meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi yang rasional, efisian dan efektif, menurunkan angka unmed need (ingin adan ditunda dan tidak ingin anak lagi) c. Mengembangkan kemitraan dengan organisasi kepemudaan, sekolah Toga/Toma dalam sosialisasi pendewasaan usia perkawinan d. Melakukan sosialisasi, pelatihan dan sarasehan terkait manajemen keluarga e. Meningkatkan kualitas kelompok Ketahanan Keluarga (BKB, BKL, BKR, PIK-R, UPPKS) dan meningkatkan pertisipasi masyarakat untuk mengikuti kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga
	Meningkatnya kualitas layanan Urusan Pemerintahan	a. Pencapaian sasaran ini diarahkan melalui strategi memperbaiki	a. Penyediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang efektif

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		pelayanan yang diberikan dengan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi atas hasil survei kepuasan masyarakat.	dan obyektif serta administrasi keuangan yang akuntabel b. Penyediaan administrasi kepegawaian, administrasi umum, sarana prasarana kantor serta jasa penunjang untuk memperlancar pelaksanaan tugas

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang serta sasaran RPJMD, ditetapkanlah tujuan Renstra. Selanjutnya dirumuskan sasaran Renstra dalam upaya pencapaian tujuan tersebut. Agar sasaran Renstra dapat dicapai, dirumuskanlah hasil kinerja berupa *outcome* yang merupakan kinerja dari program yang selanjutnya dijabarkan dalam kinerja kegiatan dan sub kegiatan. Kerangka perumusan program/kegiatan/sub kegiatan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada gambar berikut :

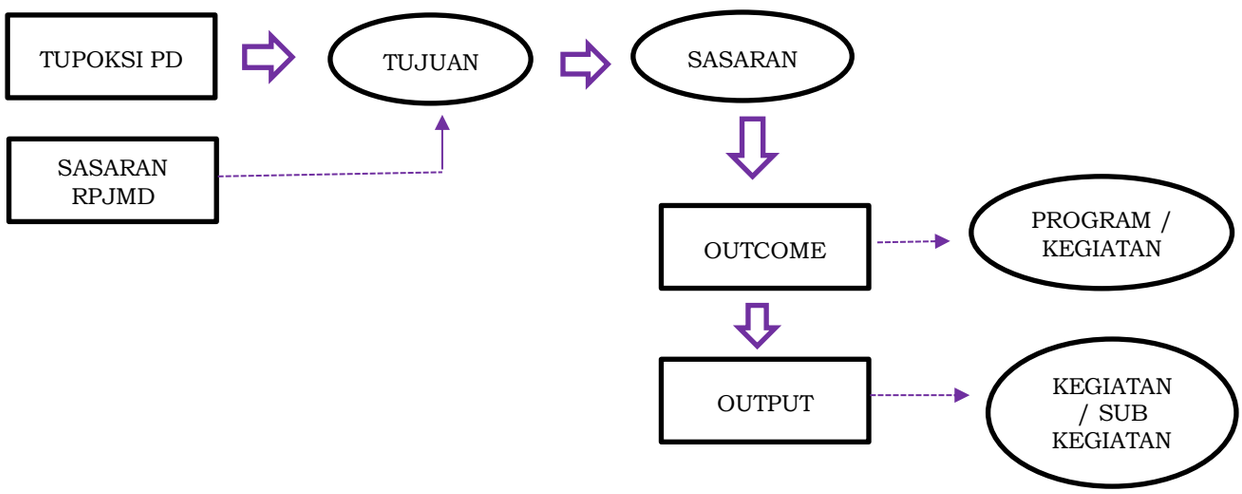

Gambar 4.1
Kerangka Penyusunan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang

Rencana program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Sub Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

A. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

https://jdih.pemalangkab.go.id

1.1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1.2 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
1.3 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
1.4 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1.5 Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan
1.6 Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
1.7 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
1.8 Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota
1.9 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota
1.10 Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi
1.11 Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial
1.12 Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

2. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota
   2.1 Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi
3. Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial
   3.1 Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
4. Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah
   4.1 Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
5. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota
   5.1 Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi
   5.2 Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan
   5.3 Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

6. Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial
   6.1 Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
7. Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah
   7.1 Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

B. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
1. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
   1.1 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
2. Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri
   2.1 Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri

3. Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri
   3.1 Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri

C. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
   1.1 Penyediaan Permakanan
   1.2 Penyediaan Sandang
   1.3 Penyediaan Alat Bantu
   1.4 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
   1.5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
   1.6 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
   1.7 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
   1.8 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
   1.9 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
   1.10 Pemberian Layanan Kedaruratan
   1.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
   1.12 Pemberian Layanan Rujukan

https://jdih.pemalangkab.go.id

1.13 Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota
1.14 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis
1.15 Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
1.16 Penyediaan Perbekalan Kesehatan
1.17 Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial

2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
2.1 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
2.2 Pemberian Layanan Kedaruratan
2.3 Penyediaan Permakanan
2.4 Penyediaan Sandang
2.5 Penyediaan Alat Bantu
2.6 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
2.7 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
2.8 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
2.9 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
2.10 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
2.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
2.12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
2.13 Pemberian Layanan Rujukan
2.14 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
2.15 Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS)
2.16 Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya
2.17 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya

D. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
1. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

https://jdih.pemalangkab.go.id

1.1 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
1.2 Rujukan Anak-Anak Terlantar
1.3 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
1.4 Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi

2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2.1 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2.2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2.3 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
2.4 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
2.5 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2.6 Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin
2.7 Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota

3. Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP
3.1 Penetapan Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial

E. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
1.1 Penyediaan Makanan
1.2 Penyediaan Sandang
1.3 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
1.4 Pelayanan Dukungan Psikososial
1.5 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi

2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
2.1 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
2.2 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
2.3 Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda
2.4 Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam
2.5 Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana
2.6 Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana
2.7 Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.8 Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah
2.9 Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)
2.10 Fasilitasi Pemetaan Rawan Konflik Sosial
2.11 Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana

3. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan BencanaKabupaten/Kota
3.1 Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana

F. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
1.1 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
1.2 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
1.3 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
1.4 Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
1.5 Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

G. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

https://jdih.pemalangkab.go.id

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   - 3.1 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
   - 3.2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - 4.1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
   - 4.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
   - 4.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - 5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - 5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - 5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   - 5.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - 5.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - 5.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   - 5.7 Fasilitasi Kunjungan Tamu
   - 5.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - 6.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - 6.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - 6.3 Pengadaan Mebel
   - 6.4 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - 6.5 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   - 6.6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - 7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - 7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - 7.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - 7.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - 8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - 8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - 8.3 Pemeliharaan Mebel
   - 8.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - 8.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   - 8.6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kantor atau Bangunan Lainnya

H. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
   - 1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
   - 1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
   - 1.3 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
   - 1.4 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG
   - 1.5 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
   - 1.6 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
   - 1.7 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
   - 1.8 Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
   - 1.9 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota
   - 1.10 Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota
   - 1.11 Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
   - 2.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
   - 2.2 Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
   - 2.3 Pendampinganlembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
   - 2.4 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
   - 2.5 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
   - 2.6 Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
   - 3.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
   - 3.2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
   - 3.3 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
   - 3.4 Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota
   - 3.5 Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota
   - 3.6 Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota
   - 3.7 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi
   - 3.8 Mengamati, menilai, dan melaporkan efektivitas program dan kegiatan lembaga penyedia layanan dalam memberdayakan perempuan, dengan fokus pada pengumpulan data, analisis pencapaian, identifikasi tantangan, serta penyusunan laporan yang memberikan gambaran tentang dampak dan kinerja lembaga dalam meningkatkan kualitas layanan di tingkat kabupaten/kota.

I. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
   - 1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
   - 1.2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
   - 1.3 Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota
   - 1.4 Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota
   - 1.5 Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi
   - 1.6 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota
   - 1.7 Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada,

https://jdih.pemalangkab.go.id

RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
   - 2.1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
   - 2.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
   - 2.3 Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
   - 2.4 Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
   - 2.5 Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
   - 2.6 Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
   - 2.7 Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota
   - 2.8 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
   - 2.9 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   - 3.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
   - 3.2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
   - 3.3 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
   - 3.4 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
   - 3.5 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
   - 3.6 Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota
   - 3.7 Pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota
   - 3.8 Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

3.9 Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

J. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   - 1.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
   - 1.2 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
   - 1.3 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
   - 1.4 Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
   - 1.5 Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
   - 1.6 Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.
   - 1.7 Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
   - 2.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   - 2.2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   - 2.3 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   - 2.4 Monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
   - 2.5 Pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
   - 2.6 Penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
   - 2.7 peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

2.8 Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
   - 3.1 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
   - 3.2 Layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota
   - 3.3 Layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota
   - 3.4 Layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota
   - 3.5 Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota
   - 3.6 Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota

K. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   - 1.1 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
   - 1.2 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
   - 1.3 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota
   - 1.4 Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak
   - 1.5 Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA

L. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
   - 1.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
   - 1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
   - 1.3 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

1.4 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

1.5 Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

1.6 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

2.1 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

2.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.3 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.4 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.5 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

2.6 Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

2.7 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

2.8 Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

2.9 Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

M. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk

https://jdih.pemalangkab.go.id

mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA

1.2 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA

1.3 Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota

1.4 Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota

1.5 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota

1.6 monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota

1.7 Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota

1.8 Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota

1.9 Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.2 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK

2.3 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

2.4 Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

2.5 Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

2.6 Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

2.7 Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

2.8 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

2.9 Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

2.10 Layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

https://jdih.pemalangkab.go.id

3.1 Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota
3.2 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota
3.3 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota
3.4 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota
3.5 Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota
3.6 Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota
3.7 Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.8 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.9 Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.10 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai
3.11 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

N. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
   1.1 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana
   1.2 Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
   2.1 Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB

O. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
   1.1 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal

https://jdih.pemalangkab.go.id

2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
   2.1 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
   3.1 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
   3.2 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
   3.3 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
   3.4 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
   3.5 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
   3.6 Peningkatan Kesertaan KB Pria
4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
   4.1 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
   4.2 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas

P. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
   1.1 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
   1.2 Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL
   1.3 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
   1.4 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
   1.5 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

https://jdih.pemalangkab.go.id

1.6 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
1.7 Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)
1.8 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
1.9 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
1.10 Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)
1.11 Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)
1.12 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)

2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
   2.1 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
   2.2 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
   2.3 Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga
   2.4 Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga
3. Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)
   3.1 Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya

Selanjutnya, perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.1
Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat (S5)	Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				% PPKS yang ditangani		
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial pada PPKS			Indeks pencapaian SPM Sosial		
					% KPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
					IKM		
					SAKIP		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	
			Meningkatnya kualitas PSKS dalam pemberdayaan PPKS		Persentase PSKS yang dibina	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Meningkatnya Kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang meningkat kapasitas/potensinya	**Prosentase potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang meningkat kapasitas/potensinya**	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	
				Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	
				Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota		
				Meningkatnya peran Puskesos sebagai layanan sosial satu pintu dan hub program graduasi	Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	
				Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	**Prosentase potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang meningkat kapasitas/potensinya**	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin dan Rentan	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	
				Terupdatenya Data SDM Kesejahteraan Sosial	**Persentase Data SDM Kesejahteraan Sosial yang terupdate**	**Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial**	
				Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial DaerahKabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terupdatenya Data Lembaga Kesejahteraan Sosial	**Persentase Data Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terupdate**	**Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah**	
				Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Lembaga yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.	
				Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya**	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin dan Rentan	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	
				Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
				Terupdatenya Data SDM Kesejahteraan Sosial	**Updating data SDM Kesejahteraan Sosial**	**Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial**	
				Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial DaerahKabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
				Terupdatenya Data Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah	**Updating data Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah**	**Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah**	
				Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Lembaga yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
			Meningkatnya kualitas penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan		**Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan mendapatkan pelayanan sosial**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	
				Meningkatnya penangananan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	**Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota**	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	
				Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
				Meningkatnya Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	**Persentase Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial**	**Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial	Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	
				Meningkatnya Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	**Persentase Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial**	**Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri**	
				Tersedianya Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial	Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	
			Meningkatnya kualitas rehabsos bagi Pemerlu Pelayananan Kesejahtaraan Sosial (PPKS)		**Persentase warga negara penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	
					Persentase PPKS di luar sasaran SPM yang terlayani		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Meningkatnya Fasilitasi Akses Pelayanan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	**Persentase Fasilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	
				Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Permakanan	
				Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Alat Bantu	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
				Terpenuhinya Orang yang membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
				Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Kedaruratan	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
				Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Rujukan	
				Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
						Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	
				Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	
				Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV / AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial yang di Rehabilitasi	**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV / AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial yang di Rehabilitasi**	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	
				Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
				Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Kedaruratan	
				Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Permakanan	
				Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Alat Bantu	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
				Terlakasananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	
				Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				(PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	(PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota		
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
				Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Rujukan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS)	
				Terlaksananya pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya	Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya	
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	
			Meningkatnya kualitas perlindungan dan pemberian jaminan sosial		**Persentase daerah (kel/desa) yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan**	**1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Persentase anak telantar dan fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		
				Meningkatnya Anak Terlantar yang Terdaftar di DTKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	**Jumlah Anak Terlantar yang Terdaftar di DTKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial**	**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	
				Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	
				Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rujukan Anak-Anak Terlantar	
				Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terfasilitasinya Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	
				Terlaksananya Updating Data Fakir miskin	**Terupdatenya Data Fakir miskin**	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengetesan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
				Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	
				Terlaksananya fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah	Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP	**Persentase Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP yang tersusun**	**Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP**	
				Tersusunnya Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial	Jumlah Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial Yang Disusun	Penetapan Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
			Meningkatnya kualitas penangananan korban bencana pada pasca bencana		**Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	
					Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		
				Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	**Pesentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terfasilitasi**	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca	Penyediaan Sandang	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
				Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	
				Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
				Meningkatnya Kapasitas SDM Terhadap Kesiapsiagaan Bencana	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	
				Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
				Tersedianya Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	
				Meningkatnya kapasitas tenaga pelopor perdamaian dalam penanganan bencana sosial dan non Alam	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam	
				Terfasilitasinya Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	
				Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	
				Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan lokal (KL)	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	
				Terlaksananya fasilitasi pemetaan rawan konflik sosial	Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial	Fasilitasi Pemetaan Rawan Konflik Sosial	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	
				Meningkatnya Kapasitas SDM Terhadap Kesiapsiagaan Bencana	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan BencanaKabupaten/Kota**	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	Jumlah SDM Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan taman makam pahlawan		**Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan**	**1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	
				Meningkatnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**Persentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik**	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pemberian pelayanan pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
					Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi		
					Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang terpenuhi		
				Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai regulasi	**Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi	**Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersusunnya Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai regulasi	**Persentase Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	
				Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi	**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				**IPG**		
					IKG (indek ketimpangan gender)		
					Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)		
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
			Meningkatnya kuaitass PUG dan pemberdayaan perempuan		**Persentase ARG pada belanja langsung APBD**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	
				Meningkatnya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	**Persentase OPD yang melaksanakan pengarusutamaan gender**	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	
				Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG Tingkat Kab/Kota	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	
				Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	
				terlaksananya bimtek penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Perempuan yang diberdayakan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	**Persentase Perempuan yang diberdayakan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan**	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/ kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	
				Terlaksananya Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi	Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan	Pendampinganlembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan	**Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	Mengamati, menilai, dan melaporkan efektivitas program dan kegiatan lembaga penyedia layanan dalam memberdayakan perempuan, dengan fokus pada pengumpulan data, analisis pencapaian, identifikasi tantangan, serta penyusunan laporan yang memberikan gambaran tentang dampak dan kinerja lembaga dalam meningkatkan kualitas layanan di tingkat kabupaten/kota.	
			Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan		**Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	
					Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Meningkatnya upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	**Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan**	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangakt Daereh yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	
				Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya upaya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	**Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilaporkan dan mendapat layanan komprehensif**	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	
				Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkatataten/Kota	Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan	**Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasaran Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumaen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan	Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	Pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas pelayanan keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		**Persentase Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	
				Meningkatnya lembaga penyedia layanan kualitas keluarga yang dibina dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak	**Persentase lembaga penyedia layanan kualitas keluarga yang dibina dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak**	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
						Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi,Informasi,Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Penguatan kerjasama antar lembag vca dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentinganKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	
				Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah	Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					yang ditetapkan oleh pemerintah.		
				Meningkatnya lembaga penyedia layanan keluarga yang dikuatkan dan dikembangkan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	**Persentase lembaga penyedia layanan keluarga yang dikuatkan dan dikembangkan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	Pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	**Persentase penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga**	**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	Layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya layanan rujukan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota	Layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
						Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	Layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota	
				Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota	Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas data pilah gender		**Persentase OPD yang memiliki data gender**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Meningkatnya OPD yang memiliki data gender dan anak	**Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak**	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	
			Meningkatnya kualitas pemenuhan hak anak melalui Kabupaten Layak Anak		**Persentase pencapaian Desa/Kelurahan Layak Anak**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	
				Meningkatnya lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang aktif dalam pelembagaan PHA	**Persentase lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang aktif dalam pelembagaan PHA**	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah,Non Pemerintah,Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah,Non Pemerintah,Media dan Dunia Usaha	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
						Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dikuatkan dan dikembangkan	**Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dikuatkan dan dikembangkan**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas	Sub Kegiatan hanya ada di

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
						Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	tahun 2025
				Terlaksananya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejarinng Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
						Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
			Meningkatnya kualitas pelayanan dalam perlindungan khusus anak		**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	
				Meningkatnya lembaga perlindungan khusus anak yang di bina	**Persentase lembaga perlindungan khusus anak yang di bina**	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah Kegiatan Pencegahan KIA Terpadu	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang Memperoleh Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan,Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (KTA)	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di Tingkat kab/ kota	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	
				Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota	Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya fasilitasi anak korban kekerasan termasuk TPPO yang melapor dan mendapat layanan komprehensif	**Persentase anak korban kekerasan termasuk TPPO yang melapor dan mendapat layanan komprehensif**	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
				Terlaksanannya Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksanannya Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	**Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang dikuatkan dan dikembangkan**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di Tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	
				Terlaksananya Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah AMPK yang memeperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				**LPP (laju Pertumbuhan Penduduk)**		
		Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk			**TFR (Angka Kelahiran Total)**		
					Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)		
					IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk		**Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	
					% kelembagaan dalam pengendalian penduduk yang aktif (Kampung KB dan SSK)		
				Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	**Persentase dokumen kebijakan pengendalian penduduk yang disusun sesuai amanat**	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	
				Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Presentase penyediaan data keluarga dan pembinaan/pengawasan serta pelaporan KKBP**	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya Perumusan dan Evaluasi Parameter Pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	
			Meningkatnya kualitas pembinaan keluarga berencana		**Persentase Jumlah Peserta KB/mCPR**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	
					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	
				Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	**Persentase pelaksanaan advokasi dan KIE KKBPK**	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		**dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	
				Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	
				Terlaksannya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	
				Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase PUS yang mendapat pelayanan KB**	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
				Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
				Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	
				Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	
				Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Peningkatan Kesertaan KB Pria	
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**Persentase organisasi kemasyarakatan peduli KB**	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	
				Terlaksananya Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan keluarga sejahtera		**% kelembagaan ketahanan keluarga aktif**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	
				Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Persesntase desa/kelurahan yang memiliki kelompok Tribina aktif**	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	
				Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana,	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana,	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana,	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	
				Terlaksananya aktifitas lansia sesuai tujuh dimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	
				Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	
				Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
				Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
				Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
				Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	
				Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
				Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	
				Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	
				Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
						Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	
				Terlaksananya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Persentase organisasi kemasyarakatan peduli Keluarga Beresiko Stunting**	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	
				Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
				Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	
				Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	
				Terlaksananya Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)	**Persentase remaja yang mendapatkan pembinaan dan sosialisasi PKBR**	**Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)**	
				Terlaksananya orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya	Jumlah Kegiatan Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya yang terlaksana	Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya	

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan target serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif untuk Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pemalang selama tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PEMALANG						36.625.247.000		32.241.036.800		30.085.131.582		36.754.505.538		40.754.505.538		40.754.505.538		40.754.505.538	
	Tujuan : Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Persentase PPKS yang ditangani	%	66,60	20.200.818.582	68,00	12.864.725.800	70,00	11.296.571.580	72,00	21.459.995.888	73,00	21.459.995.888	75,00	21.459.995.888	75,00	21.459.995.888	
	Sasaran : Meningkatnya kualitas pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial pada PPKS		Indeks pencapaian SPM Sosial	Indeks	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			% KPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			IKM	Nilai	86,00		86,10		86,15		86,20		86,25		86,30		86,35		

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
			SAKIP	Nilai	65,00		65,10		65,15		65,20		65,25		65,30		65,35		
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																		
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota				7.452.163.582		7.370.250.000		7.465.894.980		8.194.792.148		8.194.792.148		8.194.792.148		8.194.792.148	
			Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi	%	100,00	4.614.526.000	100,00	5.742.248.000	100,00	5.752.248.000	100,00	6.243.561.568	100,00	6.243.561.568	100,00	6.243.561.568	100,00	6.243.561.568	
			Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang terpenuhi	%	100,00	2.837.637.582	100,00	1.628.002.000	100,00	1.713.646.980	100,00	1.951.230.580	100,00	1.951.230.580	100,00	1.951.230.580	100,00	1.951.230.580	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai regulasi	Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi	%	100,00	201.000.000	100,00	225.803.000	100,00	235.803.000	100,00	276.457.000	100,00	276.457.000	100,00	276.457.000	100,00	276.457.000	
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	86.000.000	6	187.346.000	2	67.346.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	
1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	-	-	-	-	1	25.000.000	1	27.000.000	1	27.000.000	1	27.000.000	1	27.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	-	-	-	-	2	25.000.000	2	27.000.000	2	27.000.000	2	27.000.000	2	27.000.000	
1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	-	-	-	-	1	25.000.000	1	27.000.000	1	27.000.000	1	27.000.000	1	27.000.000	
1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	-	-	-	-	2	25.000.000	2	27.000.000	2	27.000.000	2	27.000.000	2	27.000.000	
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	15.000.000	2	13.457.000	2	23.457.000	2	23.457.000	2	23.457.000	2	23.457.000	2	23.457.000	
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	100.000.000	3	25.000.000	5	45.000.000	5	45.000.000	5	45.000.000	5	45.000.000	5	45.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi**	**Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi**	**%**	**100,00**	**4.413.526.000**	**100,00**	**5.516.445.000**	**100,00**	**5.516.445.000**	**100,00**	**5.967.104.568**	**100,00**	**5.967.104.568**	**100,00**	**5.967.104.568**	**100,00**	**5.967.104.568**	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	30	4.359.766.000	29	5.442.248.000	29	5.442.248.000	29	5.892.907.568		5.892.907.568		5.892.907.568		5.892.907.568	
1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	-	-	1	45.539.500	1	25.539.500	1	25.539.500		25.539.500		25.539.500		25.539.500	
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	13.760.000	1	6.295.500	1	26.295.500	1	26.295.500		26.295.500		26.295.500		26.295.500	
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	6	40.000.000	6	22.362.000	17	22.362.000	17	22.362.000		22.362.000		22.362.000		22.362.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai regulasi**	**Persentase Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi**	**%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00**	**4.000.000**	**100,00**	**4.000.000**	**100,00**	**4.000.000**	**100,00**	**4.000.000**	**100,00**	**4.000.000**	
1.06.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	-			1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	-			1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
1.06.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi**	**%**	**-**	**-**	**100,00**	**31.756.400**	**100,00**	**57.756.400**	**100,00**	**57.756.400**	**100,00**	**57.756.400**	**100,00**	**57.756.400**	**100,00**	**57.756.400**	
1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	-	-			1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	
1.06.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-	50	31.756.400	35	31.756.400	35	31.756.400	35	31.756.400	35	31.756.400	35	31.756.400	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-			35	25.000.000	35	25.000.000	35	25.000.000	35	25.000.000	35	25.000.000	
1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi**	**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi**		**100,00**	**124.776.800**	**100,00**	**336.102.565**	**100,00**	**262.810.065**	**100,00**	**290.364.065**	**100,00**	**290.364.065**	**100,00**	**290.364.065**	**100,00**	**290.364.065**	
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.500.500	1	14.098.480	1	14.098.480	1	14.098.480	1	14.098.480	1	14.098.480	1	14.098.480	
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	1	91.176.000	1	26.176.000	1	26.176.000	1	26.176.000	1	26.176.000	1	26.176.000	
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	6.669.000	1	15.689.585	1	15.689.585	1	15.689.585	1	15.689.585	1	15.689.585	1	15.689.585	
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	7.975.000	1	33.051.900	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	5.992.500	1	16.240.600	1	6.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	3.000.000	1	12.400.000	1	12.400.000	1	12.400.000	1	12.400.000	1	12.400.000	1	12.400.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	-	-			1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	250	95.639.800	250	153.446.000	12	126.446.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	
1.06.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**	**%**	**100,00**	**-**	**100,00**	**50.342.115**	**100,00**	**50.342.115**	**100,00**	**50.342.115**	**100,00**	**50.342.115**	**100,00**	**50.342.115**	**100,00**	**50.342.115**	
1.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	-													
1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	-													
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	-	4	50.342.115		50.342.115		50.342.115		50.342.115		50.342.115		50.342.115	
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-													
1.06.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-													

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-													
1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100,00**	**705.124.782**	**100,00**	**893.669.930**	**100,00**	**899.528.000**	**100,00**	**899.528.000**	**100,00**	**899.528.000**	**100,00**	**899.528.000**	**100,00**	**899.528.000**	
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	10.632.782	12	45.000.930	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	105.100.000	12	129.101.000	12	165.000.000	12	165.000.000	12	165.000.000	12	165.000.000	12	165.000.000	
1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	6.198.000	1	20.040.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	583.194.000	1	699.528.000	1	699.528.000	1	699.528.000	1	699.528.000	1	699.528.000	1	699.528.000	
1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	**%**	**100,00**	**2.007.736.000**	**100,00**	**316.130.990**	**100,00**	**439.210.400**	**100,00**	**649.240.000**	**100,00**	**649.240.000**	**100,00**	**649.240.000**	**100,00**	**649.240.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	-	-	-	-	99	114.050.400	99	200.000.000	99	200.000.000	99	200.000.000	99	200.000.000	
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	99	52.195.000	99	138.970.990	99	150.000.000	99	150.000.000	99	150.000.000	99	150.000.000	99	150.000.000	
1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	-	-	-	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	-	-	-	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	1.955.541.000	2	127.920.000	3	75.920.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	
1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	3	49.240.000	3	69.240.000	3	69.240.000	3	69.240.000	3	69.240.000	3	69.240.000	
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Meningkatnya kualitas PSKS dalam pemberdayaan PPKS**	**Persentase PSKS yang dibina**	**%**	**100,00**	**642.085.000**	**100,00**	**296.978.000**	**100,00**	**59.998.500**	**100,00**	**282.349.000**	**100,00**	**282.349.000**	**100,00**	**282.349.000**	**100,00**	**282.349.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang meningkat kapasitas/potensinya**	**Prosentase potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang meningkat kapasitas/potensinya**	**%**	**32,11**	**642.085.000**	**36,12**	**296.978.000**	**40,00**	**59.998.500**	**45,00**	**182.349.000**	**50,00**	**182.349.000**	**55,00**	**182.349.000**	**60,00**	**182.349.000**	
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	4.661.000	30	16.604.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	14	221.559.000	14	220.608.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	200	405.880.000	250	45.075.500	30	5.000.000	250	54.973.000	250	54.973.000	250	54.973.000	250	54.973.000	
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	10	7.569.000	20	12.376.000	50	10.000.000	50	37.376.000	50	37.376.000	50	37.376.000	50	37.376.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.02.2.03.0010	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Orang	-	-	-	-	5	5.000.000	**20**	**20.000.000**	**20**	**20.000.000**	**20**	**20.000.000**	**20**	**20.000.000**	
1.06.02.2.03.0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Orang	-	-	-	-	20	3.000.000	**20**	**5.000.000**	**20**	**5.000.000**	**20**	**5.000.000**	**20**	**5.000.000**	
1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	2.416.000	15	2.314.000	20	4.998.500	15	20.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000	
1.06.02.2.03.0013	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya peran Puskesos sebagai layanan sosial satu pintu dan hub program graduasi	Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	Lembaga	-	-	-	-	1	5.000.000	**7**	**10.000.000**	**7**	**10.000.000**	**7**	**10.000.000**	**7**	**10.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	-	-	-	-	30	7.000.000	**20**	**5.000.000**	**20**	**5.000.000**	**20**	**5.000.000**	**20**	**5.000.000**	
1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Orang (1 KUBE 10 orang)	-	-	-	-	5	5.000.000	**20**	**20.000.000**	**20**	**20.000.000**	**20**	**20.000.000**	**20**	**20.000.000**	
1.06.02.2.03.0016	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	Laporan	-	-	-	-	1	5.000.000	**1**	**5.000.000**	**1**	**5.000.000**	**1**	**5.000.000**	**1**	**5.000.000**	
1.06.02.2.03.0017	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	orang	-	-	-	-	14	10.000.000	**20**	**5.000.000**	**20**	**5.000.000**	**20**	**5.000.000**	**20**	**5.000.000**	
1.06.02.3.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah**	**Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang meningkat kapasitas/potensinya**	**%**		**-**		**-**	**100,00**	**-**	**100,00**	**30.000.000**	**100,00**	**30.000.000**	**100,00**	**30.000.000**	**100,00**	**30.000.000**	
1.06.02.3.03.0006	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui	Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin dan Rentan	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Keluarga	-	-	-	-			**50**	**30.000.000**	**50**	**30.000.000**	**50**	**30.000.000**	**50**	**30.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
	Pemberdayaan Ekonomi																		
1.06.02.3.04	**Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial**	**Terupdatenya Data SDM Kesejahteraan Sosial**	**Persentase Data SDM Kesejahteraan Sosial yang terupdate**	**%**		**-**		**-**	**100,00**	**-**	**100,00**	**5.000.000**	**100,00**	**5.000.000**	**100,00**	**5.000.000**	**100,00**	**5.000.000**	
1.06.02.3.04.0001	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial DaerahKabupaten /Kota	Jumlah SDM yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Orang	-	-	-	-			**0**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	
1.06.02.3.05	**Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah**	**Terupdatenya Data Lembaga Kesejahteraan Sosial**	**Persentase Data Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terupdate**	**%**		**-**		**-**	**100,00**	**-**	**100,00**	**5.000.000**	**100,00**	**5.000.000**	**100,00**	**5.000.000**	**100,00**	**5.000.000**	
1.06.02.3.05.0001	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.	Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Lembaga yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Lembaga	-	-	-	-			**20**	**5.000.000**	**20**	**5.000.000**	**20**	**5.000.000**	**20**	**5.000.000**	
1.06.02.4.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial**	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya**	**%**		**-**		**-**	**100,00**	**-**	**100,00**	**50.000.000**	**100,00**	**50.000.000**	**100,00**	**50.000.000**	**100,00**	**50.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.02.4.03.0006	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin dan Rentan	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Keluarga		-		-			50	**30.000.000**	50	**30.000.000**	50	**30.000.000**	50	**30.000.000**	
1.06.02.4.03.0007	Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	Laporan		-		-			1	**5.000.000**	1	**5.000.000**	1	**5.000.000**	1	**5.000.000**	
1.06.02.4.03.0008	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Orang		-		-			20	**15.000.000**	20	**15.000.000**	20	**15.000.000**	20	**15.000.000**	
1.06.02.4.04	**Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial**	**Terupdatenya Data SDM Kesejahteraan Sosial**	**Updating data SDM Kesejahteraan Sosial**	**Dokumen**	**1**	-		-	**1**	-	**1**	**10.000.000**	**1**	**10.000.000**	**1**	**10.000.000**	**1**	**10.000.000**	
1.06.02.4.04.0001	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial DaerahKabupaten /Kota	Jumlah SDM yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Orang		-		-			20	**5.000.000**	20	**5.000.000**	20	**5.000.000**	20	**5.000.000**	
1.06.02.4.05	**Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah**	**Terupdatenya Data Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah**	**Updating data Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah**	**Dokumen**	**1**	-		-	**1**	-	**1**	**5.000.000**	**1**	**5.000.000**	**1**	**5.000.000**	**1**	**5.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.02.4.05.0001	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.	Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Lembaga yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Lembaga		-		-			20	**5.000.000**	20	**5.000.000**	20	**5.000.000**	20	**5.000.000**	
1.06.03.2	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Meningkatnya kualitas penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan**	**Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan mendapatkan pelayanan sosial**	**%**		-	**100,00**	**11.925.000**	**100,00**	**150.000**	**100,00**	**11.232.300**	**100,00**	**11.232.300**	**100,00**	**11.232.300**	**100,00**	**11.232.300**	
1.06.03.2.01	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**Meningkatnya penanganan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**	**Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota**	**%**		-	**100,00**	**11.925.000**	**100,00**	**150.000**	**100,00**	**3.232.300**	**100,00**	**3.232.300**	**100,00**	**3.232.300**	**100,00**	**3.232.300**	
1.06.03.2.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		-	2	11.925.000	5	150.000	5	3.232.300	5	3.232.300	5	3.232.300	5	3.232.300	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.03.3.02	**Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri**	**Meningkatnya Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri**	**Persentase Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial**	**%**		-		-	**100,00**	-	**100,00**	**8.000.000**	**100,00**	**8.000.000**	**100,00**	**8.000.000**	**100,00**	**8.000.000**	
1.06.03.3.02.0001	Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	Tersedianya Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial	Orang		-			5	-	5	8.000.000	5	8.000.000	5	8.000.000	5	8.000.000	
1.06.03.4.02	**Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri**	**Meningkatnya Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri**	**Persentase Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial**	**%**		-		-	**100,00**	-	**100,00**	-	**100,00**	-	**100,00**	-	**100,00**	-	
1.06.03.4.02.0001	Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	Tersedianya Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial	Orang		-	-												
1.06.04.2	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Meningkatnya kualitas rehabsos bagi Pemerlu Pelayananan Kesejahtaraan Sosial (PPKS)**	**Persentase warga negara penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**	**%**	**100,00**	**11.852.770.000**	**100**	**4.483.177.800**	**100,00**	**3.475.522.786**	**100,00**	**4.201.811.840**	**100,00**	**4.201.811.840**	**100,00**	**4.201.811.840**	**100,00**	**4.201.811.840**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
			Persentase PPKS di luar sasaran SPM yang terlayani	**%**	**66,60**		**67**		**68**		**69,00**		**70,00**		**71,00**		**72,00**		
1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Meningkatnya Fasilitasi Akses Pelayanan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi**	**Persentase Fasilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi**	**%**	**100,00**	**9.566.012.000**	**100**	**4.176.200.000**	**100,00**	**2.978.222.786**	**100,00**	**3.523.575.925**	**100,00**	**3.523.575.925**	**100,00**	**3.523.575.925**	**100,00**	**3.523.575.925**	
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	58	54.270.000	280	277.709.000	294	289.200.000	309	300.000.000	324	300.000.000	340	300.000.000	357	300.000.000	
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	6.040.000	100	84.150.000	100	85.200.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	43	103.659.800	20	22.870.700	20	30.000.000	20	34.000.000	20	34.000.000	20	34.000.000	20	34.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	12.964.000	44	30.922.100	44	33.000.000	44	35.000.000	44	35.000.000	44	35.000.000	44	35.000.000	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1196	341.390.000	815	298.880.800	815	215.000.000	815	330.000.000	815	330.000.000	815	330.000.000	815	330.000.000	
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3630	3.798.490.000	1.867	2.684.325.000	2.179	1.494.400.000	2179	1.644.903.000	2179	1.644.903.000	2179	1.644.903.000	2179	1.644.903.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terpenuhinya Orang yang membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	9.000.000	150	49.422.000											
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5000	5.070.000.000	180	324.812.100	189	141.000.000	198	358.000.000	208	358.000.000	219	358.000.000	230	358.000.000	
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-	76	146.108.000	80	153.522.786	84	161.198.925	88	161.198.925	92	161.198.925	97	161.198.925	
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	157.468.200	22	87.813.200	23	92.000.000	24	97.000.000	25	97.000.000	27	97.000.000	28	97.000.000	
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-	30	3.980.000	36	36.000.000	42	43.800.000	48	43.800.000	54	43.800.000	60	43.800.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	12.730.000	83	165.207.100	85	168.000.000	87	171.000.000	89	171.000.000	91	171.000.000	93	171.000.000	
1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-			150	52.900.000	157	55.545.000	165	55.545.000	173	55.545.000	182	55.545.000	
1.06.04.2.01.0015	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Orang	-	-			15	45.000.000	15	45.000.000	15	45.000.000	15	45.000.000	15	45.000.000	
1.06.04.2.01.0016	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-			20	20.000.000	28	28.000.000	32	28.000.000	36	28.000.000	40	28.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.04.2.01.0017	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-			15	18.000.000	21	25.129.000	24	25.129.000	27	25.129.000	30	25.129.000	
1.06.04.2.01.0018	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	-	-			50	105.000.000	50	105.000.000	50	105.000.000	50	105.000.000	50	105.000.000	
1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV / AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial yang di Rehabilitasi**	**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV / AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial yang di Rehabilitasi**	**orang**	**4.083**	**2.286.758.000**	**1.143**	**306.977.800**	**808**	**497.300.000**	**845**	**678.235.915**	**869**	**678.235.915**	**893**	**678.235.915**	**917**	**678.235.915**	
1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-			20	10.000.000	25	12.535.840	30	12.535.840	35	12.535.840	40	12.535.840	
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-			20	10.000.000	25	12.500.075	30	12.500.075	35	12.500.075	40	12.500.075	
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	-	-			50	12.500.000	60	15.000.000	65	15.000.000	70	15.000.000	75	15.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
			Kewenangan Kabupaten/Kota																
1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-			50	12.500.000	60	15.000.000	65	15.000.000	70	15.000.000	75	15.000.000	
1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-			20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	
1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-	12	37.852.800	13	10.000.000	14	10.500.000	15	10.500.000	16	10.500.000	17	10.500.000	
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	604	250.000.000	100	21.400.000	100	22.500.000	100	23.700.000	100	23.700.000	100	23.700.000	100	23.700.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Terlakasananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3439	1.658.620.000	1.031	91.725.000	100	5.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-			70	41.000.000	70	15.000.000	70	15.000.000	70	15.000.000	70	15.000.000	
1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	292.500.000			100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-			10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-			10	5.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-			10	5.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	1	85.638.000	2	156.000.000	3	163.800.000	3	172.000.000	3	172.000.000	3	172.000.000	3	172.000.000	
1.06.04.2.02.0015	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS)	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-			20	10.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	
1.06.04.2.02.0016	Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya	Terlaksananya pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya	Orang	-	-			200	10.000.000	200	10.500.000	200	10.500.000	200	10.500.000	200	10.500.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.04.2.02.0017	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Aduan	-	-			15	10.000.000	21	31.500.000	24	31.500.000	27	31.500.000	30	31.500.000	
1.06.05.2	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Meningkatnya kualitas perlindungan dan pemberian jaminan sosial**	**Persentase daerah (kel/desa) yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan**	**%**	**100,00**	**180.978.000**	**100,00**	**437.395.000**	**100,00**	**130.000.000**	**100,00**	**8.530.457.700**	**100,00**	**8.530.457.700**	**100,00**	**8.530.457.700**	**100,00**	**8.530.457.700**	
			Persentase anak telantar dan fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	**%**	**28,49**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		
1.06.05.2.01	**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**Meningkatnya Anak Terlantar yang Terdaftar di DTKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial**	**Jumlah Anak Terlantar yang Terdaftar di DTKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial**	**orang**	**5**	**8.398.900**	**5**	**42.297.200**	**120**	**49.311.700**	**120**	**202.414.500**	**120**	**202.414.500**	**120**	**202.414.500**	**120**	**202.414.500**	
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	1.000.000	5	2.675.000	10	5.000.000	120	50.000.000	120	50.000.000	120	50.000.000	120	50.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	4.984.400	5	6.180.500	10	9.870.000	120	50.000.000	120	50.000.000	120	50.000.000	120	50.000.000	
1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	2.414.500	120	33.441.700	120	33.441.700	120	52.414.500	120	52.414.500	120	52.414.500	120	52.414.500	
1.06.05.2.01.0004	Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Terfasilitasinya Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Orang	-	-			1	1.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	
1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Updating Data Fakir miskin**	**Terupdatenya Data Fakir miskin**	**Dokumen**	**12**	**172.579.100**	**12**	**395.097.800**	**12**	**75.688.300**	**12**	**8.328.043.200**	**12**	**8.328.043.200**	**12**	**8.328.043.200**	**12**	**8.328.043.200**	
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	1.010.996	59.956.800	45.000	310.025.300	45.000	26.655.000	45000	310.025.300	45000	310.025.300	45000	310.025.300	45000	310.025.300	
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengetesan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	210.589	60.528.800	45.000	39.999.800											

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	5	50.000.000	30	42.941.700											
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	2.093.500	10	2.131.000	10	2.805.000	10	2.093.500	10	2.093.500	10	2.093.500	10	2.093.500	
1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	5	-			10	7.674.000	30	1.444.866.800	30	1.444.866.800	30	1.444.866.800	30	1.444.866.800	
1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengetesan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	210.589	-			45.000	24.190.000	45000	60.528.800	45000	60.528.800	45000	60.528.800	45000	60.528.800	
1.06.05.2.02.0009	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-			5	5.000.000	500	6.410.528.800	500	6.410.528.800	500	6.410.528.800	500	6.410.528.800	
1.06.05.2.02.0010	Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Terlaksananya fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah	Orang	-	-			5	9.364.300	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.05.3.03	**Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP**	**Meningkatnya Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP**	**Persentase Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP yang tersusun**	**%**		-		-	**100,00**	**5.000.000**									
1.06.05.3.03.0001	Penetapan Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial	Tersusunnya Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial	Jumlah Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial Yang Disusun	Dokumen	-	-			1	5.000.000									
1.06.06.2	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Meningkatnya kualitas penangananan korban bencana pada pasca bencana**	**Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota**	**%**	**100,00**	**38.907.000**	**100,00**	**250.000.000**	**100,00**	**150.003.814**	**100,00**	**224.352.900**	**100,00**	**224.352.900**	**100,00**	**224.352.900**	**100,00**	**224.352.900**	
			Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	**%**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		
1.06.06.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial**	**Pesentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terfasilitasi**	**%**	**100,00**	**13.810.000**	**100,00**	**178.382.000**	**100,00**	**65.003.814**	**100,00**	**94.102.900**	**100,00**	**94.090.400**	**100,00**	**94.090.400**	**100,00**	**94.090.400**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	2.950.000	225	51.450.000	250	20.003.814	250	39.102.900	250	39.090.400	250	39.090.400	250	39.090.400	
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	7.260.000	225	98.550.000	250	15.000.000	250	25.000.000	250	25.000.000	250	25.000.000	250	25.000.000	
1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	3	1.200.000	3	4.586.000											
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	1.200.000	35	9.864.400	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	1.200.000	40	13.931.600	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	
1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-			20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.06.2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Kapasitas SDM Terhadap Kesiapsiagaan Bencana**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana**	**%**	**100,00**	**25.097.000**	**100,00**	**71.618.000**	**100,00**	**77.500.000**	**100,00**	**120.250.000**	**100,00**	**120.512.500**	**100,00**	**120.512.500**	**100,00**	**120.512.500**	
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	1	6.691.900	1	44.108.100	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	37	18.405.100	40	27.509.900	50	5.000.000	50	5.250.000	50	5.512.500	50	5.512.500	50	5.512.500	
1.06.06.2.02.0003	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	Tersedianya Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	-	-	-		50	10.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	
1.06.06.2.02.0004	Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam	Meningkatnya kapasitas tenaga pelopor perdamaian dalam penanganan bencana sosial dan non Alam	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Orang	-	-	-		30	10.000.000	30	15.000.000	30	15.000.000	30	15.000.000	30	15.000.000	
1.06.06.2.02.0005	Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Terfasilitasinya Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	Desa/ Kelurahan	-	-	-		2	15.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	
1.06.06.2.02.0006	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Orang	-	-	-		50	5.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.06.2.02.0007	Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	Keluarga	-	-	-		250	10.000.000	250	15.000.000	250	15.000.000	250	15.000.000	250	15.000.000	
1.06.06.2.02.0008	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	Orang	-	-	-		500	5.000.000	500	10.000.000	500	10.000.000	500	10.000.000	500	10.000.000	
1.06.06.2.02.0009	Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan lokal (KL)	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Dokumen	-	-	-		2	5.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
1.06.06.2.02.0010	Fasilitasi Pemetaan Rawan Konflik Sosial	Terlaksananya fasilitasi pemetaan rawan konflik sosial	Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial	Daerah	-	-	-		223	2.500.000	223	5.000.000	223	5.000.000	223	5.000.000	223	5.000.000	
1.06.06.2.02.0011	Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Terlaksananya penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	Orang	-	-	-		1.000	5.000.000	1000	10.000.000	1000	10.000.000	1000	10.000.000	1000	10.000.000	
1.06.06.4.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan BencanaKabupaten/ Kota**	**Meningkatnya Kapasitas SDM Terhadap Kesiapsiagaan Bencana**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana**	**%**		**-**		**-**	**100,00**	**7.500.000**	**100,00**	**10.000.000**	**100,00**	**9.750.000**	**100,00**	**9.750.000**	**100,00**	**9.750.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.06.4.02.0003	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	Jumlah SDM Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Orang	-	-	-		50	7.500.000	50	10.000.000	50	9.750.000	50	9.750.000	50	9.750.000	
1.06.07.2	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Meningkatnya kualitas pengelolaan taman makam pahlawan**	**Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan**	**%**	**100,00**	**33.915.000**	**100,00**	**15.000.000**	**100,00**	**15.001.500**	**100,00**	**15.000.000**	**100,00**	**15.000.000**	**100,00**	**15.000.000**	**100,00**	**15.000.000**	
1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Persentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik**	**%**	**100,00**	**33.915.000**	**100,00**	**15.000.000**	**100,00**	**15.001.500**	**100,00**	**15.000.000**	**100,00**	**15.000.000**	**100,00**	**15.000.000**	**100,00**	**15.000.000**	
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen	1	6.668.000	1	8.235.000	1	7.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	1	7.327.000	1	6.765.000	1	8.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Laporan	1	19.920.000			1	500	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	
1.06.07.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberian pelayanan pemakaman di Taman Makam Pahlawan	Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Orang		-			1	500	163	1.000.000	163	1.000.000	163	1.000.000	163	1.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
		Nasional Kabupaten/Kota																	
1.06.07.2.01.0005	Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Orang	-	-			1	500	20	3.500.000	20	3.500.000	20	3.500.000	20	3.500.000	
	Tujuan : Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		**IPG**	**Indeks**	**87,37**	**2.335.500.000**	**87**	**1.128.660.000**	**88**	**897.660.002**	**87,55**	**1.046.858.650**	**87,60**	**1.046.858.650**	**87,65**	**1.046.858.650**	**87,70**	**1.046.858.650**	
	Sasaran :Meningkatnya kualtas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak		**IKG (indek ketimpangan gender)**	**Indeks**	**0,380**		**0**		**0**		**0,380**		**0,370**		**0,360**		**0,350**		
			Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	**Nilai**					**Nindya (780)**		**Utama (820)**		**Utama (850)**		**Utama (880)**		**Utama (900)**		
2.08.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**																		

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.08.02.2	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Meningkatnya kuaitass PUG dan pemberdayaan perempuan**	**Persentase ARG pada belanja langsung APBD**	**%**	**5,40**	**955.000.000**	**4**	**117.500.000**	**4**	**112.800.000**	**4,50**	**117.925.000**	**4,60**	**117.925.000**	**4,70**	**117.925.000**	**4,80**	**117.925.000**	
2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)**	**Persentase OPD yang melaksanakan pengarusutamaan gender**	**%**	**90,00**	**50.000.000**	**100,00**	**50.000.000**	**100,00**	**37.425.000**	**100,00**	**41.940.000**	**100,00**	**41.940.000**	**100,00**	**41.940.000**	**100,00**	**41.940.000**	
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	5.000.000	1	7.500.000	1	5.000.000	1	6.625.000	1	6.625.000	1	6.625.000	1	6.625.000	
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan/Kota	Dokumen	1	7.000.000	1	7.500.000											
2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	38	7.000.000													

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	26	5.000.000													
2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	orang	50	7.000.000	50	10.000.000											
2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	Laporan	1	7.000.000	1	7.500.000	1	5.000.000	1	5.450.000	1	5.450.000	1	5.450.000	1	5.450.000	
2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Terlaksananya Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG Tingkat Kab/Kota	orang	50	5.000.000	1	7.500.000											
2.08.02.2.01.0010	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	Kebijakan	1	7.000.000	1	10.000.000	1	5.000.000	1	7.440.000	1	7.440.000	1	7.440.000	1	7.440.000	
2.08.02.2.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	-	-			41	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.08.02.2.01.0012	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	-	-			1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
2.08.02.2.01.0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	-	-			50	7.000.000	50	7.000.000	50	7.000.000	50	7.000.000	50	7.000.000	
2.08.02.2.01.0014	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya bimtek penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Orang	-	-			41	8.425.000	41	8.425.000	41	8.425.000	41	8.425.000	41	8.425.000	
2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Perempuan yang diberdayakan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase Perempuan yang diberdayakan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan**	**%**	**0,065**	**255.000.000**	**0**	**22.500.000**	**0**	**46.375.000**	**0,075**	**46.985.000**	**0,077**	**46.985.000**	**0,080**	**46.985.000**	**0,082**	**46.985.000**	
2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/ kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Lembaga	30	250.000.000	36	15.000.000	36	10.000.000	36	10.000.000	36	10.000.000	36	10.000.000	36	10.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.08.02.2.02.0005	Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi	Lembaga	-	-			36	12.000.000	36	12.000.000	36	12.000.000	36	12.000.000	36	12.000.000	
2.08.02.2.02.0006	Pendampinganlembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	-	-			36	5.875.000	36	5.875.000	36	5.875.000	36	5.875.000	36	5.875.000	
2.08.02.2.02.0007	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	laporan	-	-			1	1.000.000	1	1.610.000	1	1.610.000	1	1.610.000	1	1.610.000	
2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	orang	1	5.000.000	1	7.500.000	50	7.500.000	50	7.500.000	50	7.500.000	50	7.500.000	50	7.500.000	
2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Orang	-	-			50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan**	**Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan**	**%**	**57,00**	**650.000.000**	**62**	**45.000.000**	**67**	**29.000.000**	**72,00**	**29.000.000**	**77,00**	**29.000.000**	**82,00**	**29.000.000**	**87,00**	**29.000.000**	
2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	35	200.000.000	35	**10.000.000**											
2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	350	200.000.000	350	**20.000.000**											
2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	250.000.000	1	**15.000.000**					1						
2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	-	-			20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.08.02.2.03.0008	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	dokumen	-	-			1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
2.08.02.2.03.0009	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	laporan	-	-			1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
2.08.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	orang	-	-			50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	
2.08.02.2.03.0011	mengamati, menilai, dan melaporkan efektivitas program dan kegiatan lembaga penyedia layanan dalam memberdayakan perempuan, dengan fokus pada pengumpulan data, analisis pencapaian, identifikasi tantangan, serta penyusunan laporan yang memberikan gambaran tentang dampak dan kinerja lembaga dalam meningkatkan kualitas layanan di tingkat kabupaten/kota.	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	Lembaga	-	-			25	10.000.000	25	10.000.000	25	10.000.000	25	10.000.000	25	10.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.08.03.2	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan**	**Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)**	**%**	**0,02**	**367.500.000**	**0**	**444.850.000**	**0**	**312.641.002**	**0,02**	**416.378.650**	**0,02**	**416.378.650**	**0,02**	**416.378.650**	**0,02**	**416.378.650**	
			Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	**%**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		
2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan**	**Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan**	**%**	**7,50**	**305.000.000**	**7**	**124.250.000**	**7**	**102.280.002**	**7,20**	**121.500.000**	**7,10**	**121.500.000**	**7,00**	**121.500.000**	**6,90**	**121.500.000**	
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	5.000.000	1	104.250.000											
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangakt Daereh yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	20	300.000.000	50	20.000.000											
2.08.03.2.01.0003	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	laporan	-	-			1	40.000.002	1	59.220.000	1	59.220.000	1	59.220.000	1	59.220.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.08.03.2.01.0004	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-			1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
2.08.03.2.01.0005	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	orang	-	-			15	20.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000	
2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Lembaga	-	-			30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	
2.08.03.2.01.0007	Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kebijakan	-	-			1	7.280.000	1	7.280.000	1	7.280.000	1	7.280.000	1	7.280.000	
2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya upaya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan**	**Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilaporkan dan mendapat layanan komprehensif**	**%**	**100,00**	**37.500.000**	**100,00**	**223.334.000**	**100,00**	**136.620.000**	**100,00**	**218.978.650**	**100,00**	**218.978.650**	**100,00**	**218.978.650**	**100,00**	**218.978.650**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	50	7.500.000	2	8.409.200											
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	8	30.000.000	11	214.924.800											
2.08.03.2.02.0003	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota	Orang	-	-			14	7.000.000	14	14.000.000	14	14.000.000	14	14.000.000	14	14.000.000	
2.08.03.2.02.0004	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota	Orang	-	-			4	12.000.000	4	24.000.000	4	24.000.000	4	24.000.000	4	24.000.000	
2.08.03.2.02.0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	orang	-	-			29	43.500.000	29	43.500.000	29	43.500.000	29	43.500.000	29	43.500.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.08.03.2.02.0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	-	-			6	2.700.000	6	27.000.000	6	27.000.000	6	27.000.000	6	27.000.000	
2.08.03.2.02.0007	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	orang	-	-			35	12.250.000	35	27.308.650	35	27.308.650	35	27.308.650	35	27.308.650	
2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	orang	-	-			55	47.170.000	55	47.170.000	55	47.170.000	55	47.170.000	55	47.170.000	
2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	orang	-	-			60	12.000.000	60	36.000.000	60	36.000.000	60	36.000.000	60	36.000.000	
2.08.03.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan**	**Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan**	**%**	**90,39**	**25.000.000**	**100,00**	**97.266.000**	**100,00**	**73.741.000**	**100,00**	**75.900.000**	**100,00**	**75.900.000**	**100,00**	**75.900.000**	**100,00**	**75.900.000**	**Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan di Kab. Pemalang UPTD PPA (1), UPPA (60), Puspaga (1),**

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasaran Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	7.500.000	1	5.000.000											
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	5.000.000	30	71.270.000											
2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	5	7.500.000	12	8.496.000											
2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumaen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	5.000.000	1	12.500.000											
2.08.03.2.03.0005	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga	Lembaga	-	-			10	4.400.000	10	4.400.000	10	4.400.000	10	4.400.000	10	4.400.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
			pemerintah dan non pemerintah)																
2.08.03.2.03.0006	Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	Laporan	-	-			1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
2.08.03.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	Orang	-	-			15	6.200.000	15	8.359.000	15	8.359.000	15	8.359.000	15	8.359.000	
2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	orang	-	-			223	40.620.000	223	40.620.000	223	40.620.000	223	40.620.000	223	40.620.000	
2.08.03.2.03.0009	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Dokumen	-	-			2	2.521.000	2	2.521.000	2	2.521.000	2	2.521.000	2	2.521.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.08.04.2	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Meningkatnya kualitas pelayanan keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**	**Persentase Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya**	**%**	**30,00**	**440.500.000**	**35**	**210.000.000**	**40**	**125.160.000**	**45,00**	**203.302.000**	**50,00**	**203.302.000**	**55,00**	**203.302.000**	**60,00**	**203.302.000**	
2.08.04.2.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya lembaga penyedia layanan kualitas keluarga yang dibina dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak**	**Persentase lembaga penyedia layanan kualitas keluarga yang dibina dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak**	**%**	**100,00**	**228.500.000**	**100,00**	**72.000.000**	**100,00**	**37.700.000**	**100,00**	**68.302.000**	**100,00**	**68.302.000**	**100,00**	**68.302.000**	**100,00**	**68.302.000**	
2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	50	100.000.000	65	47.000.000											
2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi,Informasi,Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	3.500.000	1	5.000.000											
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	125.000.000	1	20.000.000											

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.08.04.2.01.0004	Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Lembaga	-	-			100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	
2.08.04.2.01.0005	Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kebijakan	-	-			100	10.000.000	300	30.000.000	300	30.000.000	300	30.000.000	300	30.000.000	
2.08.04.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/ kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentinganKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-			100	10.000.000	200	20.000.000	200	20.000.000	200	20.000.000	200	20.000.000	
2.08.04.2.01.0007	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat	Dokumen	-	-			35	7.700.000	35	8.302.000	35	8.302.000	35	8.302.000	35	8.302.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
			kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.																
2.08.04.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya lembaga penyedia layanan keluarga yang dikuatkan dan dikembangkan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak**	**Persentase lembaga penyedia layanan keluarga yang dikuatkan dan dikembangkan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak**	**%**	**100,00**	**205.000.000**	**100,00**	**133.000.000**	**100,00**	**52.460.000**	**100,00**	**75.000.000**	**100,00**	**75.000.000**	**100,00**	**75.000.000**	**100,00**	**75.000.000**	
2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	1	125.000.000	1	27.000.000											
2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	75.000.000	115	96.000.000											

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.08.04.2.02.0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	5.000.000	1	10.000.000											
2.08.04.2.02.0004	monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-			50	7.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	
2.08.04.2.02.0005	pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	-	-			45	15.000.000	45	15.000.000	45	15.000.000	45	15.000.000	45	15.000.000	
2.08.04.2.02.0006	penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	-	-			100	10.460.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	
2.08.04.2.02.0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Lembaga	-	-			100	10.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.08.04.2.02.0008	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	-	-			40	10.000.000	40	10.000.000	40	10.000.000	40	10.000.000	40	10.000.000	
2.08.04.2.03	**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga**	**Persentase penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga**	**%**	**100,00**	**7.000.000**	**100,00**	**5.000.000**	**100,00**	**35.000.000**	**100,00**	**60.000.000**	**100,00**	**60.000.000**	**100,00**	**60.000.000**	**100,00**	**60.000.000**	
2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Layanan	1	7.000.000	1	5.000.000											
2.08.04.2.03.0002	layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Terlaksananya layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	-	-			50	10.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	
2.08.04.2.03.0003	layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota	Terlaksananya layanan rujukan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	-	-			50	10.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.08.04.2.03.0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota	Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	-	-			25	5.000.000	25	10.000.000	25	10.000.000	25	10.000.000	25	10.000.000	
2.08.04.2.03.0005	Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	-	-			25	5.000.000	25	10.000.000	25	10.000.000	25	10.000.000	25	10.000.000	
2.08.04.2.03.0006	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	-	-			25	5.000.000	25	10.000.000	25	10.000.000	25	10.000.000	25	10.000.000	
2.08.05.2	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Meningkatnya kualitas data pilah gender**	**% OPD yang memiliki data gender**	**%**	**85,18**	**14.500.000**	**89**	**20.000.000**	**93**	**5.330.000**	**95,77**	**13.733.000**	**97,99**	**13.733.000**	**98,00**	**13.733.000**	**100,00**	**13.733.000**	
2.08.05.2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya OPD yang memiliki data gender dan anak**	**Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak**	**%**	**50,00**	**14.500.000**	**60**	**20.000.000**	**65**	**5.330.000**	**70,00**	**13.733.000**	**75,00**	**13.733.000**	**80,00**	**13.733.000**	**85,00**	**13.733.000**	**Jumlah OPD 41, jumlah yg memiliki data siga saat ini 25, target pertahun ditambah 2 OPD**
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	7.500.000	2	10.000.000											

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	3	7.000.000	1	10.000.000											
2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	-	-			30	2.000.000	30	2.000.000	30	2.000.000	30	2.000.000	30	2.000.000	
2.08.05.2.01.0004	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak	Lembaga	-	-			35	2.330.000	35	2.000.000	35	2.000.000	35	2.000.000	35	2.000.000	
2.08.05.2.01.0005	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Terlaksananya penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Dokumen	-	-			1	1.000.000	1	9.733.000	1	9.733.000	1	9.733.000	1	9.733.000	
2.08.06.2	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Meningkatnya kualitas pemenuhan hak anak melalui Kabupaten Layak Anak**	**Persentase pencapaian Desa/Kelurahan Layak Anak**	**%**	**44,39**	**405.500.000**	**47**	**168.500.000**	**49**	**141.400.000**	**51,12**	**131.572.000**	**53,36**	**131.572.000**	**56,51**	**131.572.000**	**57,58**	**131.572.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang aktif dalam pelembagaan PHA**	**Persentase lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang aktif dalam pelembagaan PHA**	**%**	**78,66**	**382.500.000**	**81**	**152.500.000**	**82,95**	**100.000.000**	**85,20**	**100.000.000**	**87,44**	**100.000.000**	**89,69**	**100.000.000**	**91,92**	**100.000.000**	**Jumlah Lembaga PHA (OPD 41, Dekela 130, DRPPA 46, Organisasi Wanita 35) dibagi (jumlah opd 41, jumlah desa keluraha n 223, jumlah OW 35) dikali 100 persen (target kenaikan per tahun 5 lembaga)**
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah,Non Pemerintah,Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah,Non Pemerintah,Media dan Dunia Usaha	Organisasi	25	275.000.000	25	52.500.000											
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	107.500.000	1	100.000.000											

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	-	-			25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	
2.08.06.2.01.0004	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-			50	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
2.08.06.2.01.0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	-	-			25	20.000.000	25	20.000.000	25	20.000.000	25	20.000.000	25	20.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.08.06.2.01.0006	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	-	-			1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
2.08.06.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dikuatkan dan dikembangkan**	**Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dikuatkan dan dikembangkan**	**%**	**58,35**	**23.000.000**	**64**	**16.000.000**	**67,26**	**41.400.000**	**69,50**	**31.572.000**	**71,74**	**31.572.000**	**73,99**	**31.572.000**	**76,23**	**31.572.000**	**Jumlah Dekela dibagi Jumlah Desa/Kelurahan**
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	5.000.000	25	7.000.000											
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	7.500.000	1	3.500.000											
2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	3.000.000	1	3.000.000											

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
		Daerah Kabupaten/Kota																	
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejarinng Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	7.500.000	1	2.500.000											
2.08.06.2.02.0005	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Orang	-	-			50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	
2.08.06.2.02.0006	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-			1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
2.08.06.2.02.0007	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	-	-			5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.08.06.2.02.0008	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	-	-			1	11.400.000	1	1.572.000	1	1.572.000	1	1.572.000	1	1.572.000	
2.08.06.2.02.0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	-	-			50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	
2.08.07.2	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Meningkatnya kualitas pelayanan dalam perlindungan khusus anak**	**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota**	**%**	**100,00**	**152.500.000**	**100**	**167.810.000**	**100**	**200.329.000**	**100,00**	**163.948.000**	**100,00**	**163.948.000**	**100,00**	**163.948.000**	**100,00**	**163.948.000**	
2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya lembaga perlindungan khusus anak yang di bina**	**Persentase lembaga perlindungan khusus anak yang di bina**	**%**	**40,00**	**112.500.000**	**50,00**	**23.000.000**	**60,00**	**35.334.000**	**70,00**	**35.334.000**	**80,00**	**35.334.000**	**90,00**	**35.334.000**	**100,00**	**35.334.000**	**Lembaga Layanan Perlindungan Khusus Anak Puspaga 1, UPTD PPA 1, PATBM 46**
2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Terlaksananya Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan	Jumlah Kegiatan Pencegahan KIA Terpadu	Kegiatan	3	7.500.000	1	5.000.000											

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
		layak Anak, dan DRPPA																	
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Terlaksananya Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang Memperoleh Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan,Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (KTA)	Orang	100	100.000.000	20	15.000.000											
2.08.07.2.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Terlaksananya Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di Tingkat kab/ kota	Dokumen	1	5.000.000	1	3.000.000											
2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	-	-			1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	Kegiatan	-	-			2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	
2.08.07.2.01.0008	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Laporan	-	-			1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.08.07.2.01.0009	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Dokumen	-	-			1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
2.08.07.2.01.0010	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Orang	-	-			50	11.334.000	50	11.334.000	50	11.334.000	50	11.334.000	50	11.334.000	
2.08.07.2.01.0011	Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota	Kebijakan	-	-			1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya fasilitasi anak korban kekerasan termasuk TPPO yang melapor dan mendapat layanan komprehensif**	**Persentase anak korban kekerasan termasuk TPPO yang melapor dan mendapat layanan komprehensif**	**%**	**50,77**	**12.000.000**	**58,46**	**123.310.000**	**100,00**	**128.995.000**	**100,00**	**92.614.000**	**100,00**	**92.614.000**	**100,00**	**92.614.000**	**100,00**	**92.614.000**	**Semua anak yang melapor ke UPTD dan Puspaga mendapatkan layanan komprehensif**
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanannya Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	15	5.000.000	20	3.000.000											

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Terlaksanannya Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan	Orang	20	7.000.000	80	120.310.000											
2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	-	-			41	17.795.000	41	18.314.000	41	18.314.000	41	18.314.000	41	18.314.000	
2.08.07.2.02.0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	-	-			90	18.000.000	45	9.000.000	45	9.000.000	45	9.000.000	45	9.000.000	
2.08.07.2.02.0010	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	-	-			60	22.800.000	30	11.400.000	30	11.400.000	30	11.400.000	30	11.400.000	
2.08.07.2.02.0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	-	-			6	18.100.000	6	18.100.000	6	18.100.000	6	18.100.000	6	18.100.000	
2.08.07.2.02.0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	-	-			8	4.800.000	8	4.800.000	8	4.800.000	8	4.800.000	8	4.800.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	-	-			90	18.000.000	45	9.000.000	45	9.000.000	45	9.000.000	45	9.000.000	
2.08.07.2.02.0014	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	-	-			14	7.000.000	14	7.000.000	14	7.000.000	14	7.000.000	14	7.000.000	
2.08.07.2.02.0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	-	-			30	22.500.000	20	15.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000	
2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus**	**Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang dikuatkan dan dikembangkan**	**%**	**71,66**	**28.000.000**	**80,00**	**21.500.000**	**83,33**	**36.000.000**	**85,41**	**36.000.000**	**87,50**	**36.000.000**	**89,58**	**36.000.000**	**91,66**	**36.000.000**	**Lembaga Layanan Perlindungan Khusus Anak Puspaga 1, UPTD PPA 1, PATBM 46**
2.08.07.2.03.0004	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	Terlaksananya Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di Tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar	Lembaga	2	7.500.000	2	3.000.000											

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Kegiatan	1	7.500.000	1	5.500.000											
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK	Orang	30	7.500.000	30	7.500.000											
2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) Perlindungan Khusus Anak	Dokumen	1	3.000.000	1	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	
2.08.07.2.03.0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah AMPK yang memeperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus	Orang	2	2.500.000	2	2.500.000											
2.08.07.2.03.0009	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Dokumen	-	-			1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.08.07.2.03.0010	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	-	-			1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	
2.08.07.2.03.0011	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	-	-			5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	
2.08.07.2.03.0012	Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-			1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Orang	-	-			50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.08.07.2.03.0014	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	-	-			50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	
	Tujuan : Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		**LPP (laju Pertumbuhan Penduduk)**	**%**	**1,25**	**14.088.928.418**	**1**	**18.247.651.000**	**1**	**17.890.900.000**	**1,21**	**14.247.651.000**	**1,20**	**18.247.651.000**	**1,19**	**18.247.651.000**	**1,18**	**18.247.651.000**	
	Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk		**TFR (Angka Kelahiran Total)**	**Jiwa**	**2,18**		**2,17**		**2,16**		**2,15**		**2,14**		**2,13**		**2,12**		
			Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	**Angka**	**62,77**		**63,60**		**64,29**		**65,05**		**65,80**		**66,56**		**67,32**		
			IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	**Angka**	**64,30**		**65,30**		**66,30**		**67,30**		**68,30**		**69,30**		**70,30**		
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**																		
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk**	**Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)**	**%**	**17,50**	**9.365.723.693**	**17,20**	**9.554.057.000**	**16,50**	**9.031.852.000**	**16,10**	**5.554.057.000**	**15,70**	**9.554.057.000**	**15,30**	**9.554.057.000**	**14,90**	**9.554.057.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
		Persentase pemetaan dan pengelolaan data pengendalian penduduk, yang mencakup pencatatan, pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data secara menyeluruh di wilayah kabupaten/kota	**Persentase kelembagaan dalam pengendalian penduduk yang aktif (Kampung KB dan SSK)**	**%**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**(Kampung KB Mandiri)**
2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Persentase dokumen kebijakan pengendalian penduduk yang disusun sesuai amanat**	**%**		**-**		**-**	**100,00**	**100.000.000**	**100,00**	**50.000.000**	**100,00**	**50.000.000**	**100,00**	**75.000.000**	**100,00**	**75.000.000**	
2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kegiatan	0	-	-	-	1	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	
2.14.02.2.01.0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	0	-	-	-	1	50.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase penyediaan data keluarga dan pembinaan/pengawasan serta pelaporan KKBP**	**%**	**100,00**	**9.365.723.693**	**100,00**	**9.554.057.000**	**100,00**	**8.931.852.000**	**100,00**	**5.504.057.000**	**100,00**	**9.504.057.000**	**100,00**	**9.479.057.000**	**100,00**	**9.479.057.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.14.02.2.02.0025	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	Terlaksananya Perumusan dan Evaluasi Parameter Pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	Dokumen	1	9.365.723.693	1	9.554.057.000	1	8.931.852.000	1	5.504.057.000	1	9.504.057.000	1	9.479.057.000	1	9.479.057.000	
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Meningkatnya kualitas pembinaan keluarga berencana**	**Persentase Jumlah Peserta KB/mCPR**	**%**	**70,75**	**3.153.733.000**	**70,75**	**7.819.654.000**	**70,85**	**6.610.808.000**	**70,95**	**7.819.654.000**	**71,05**	**7.819.654.000**	**71,15**	**7.819.654.000**	**71,25**	**7.819.654.000**	
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	**%**	**9,78**		**9,68**		**9,58**	**-**	**9,48**	**-**	**9,38**		**9,28**		**9,18**		
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Persentase pelaksanaan advokasi dan KIE KKBPK**	**%**	**100,00**	**3.100.000**	**100,00**	**200.000.000**	**100,00**	**250.000.000**	**100,00**	**250.000.000**	**100,00**	**250.000.000**	**100,00**	**250.000.000**	**100,00**	**250.000.000**	
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Dokumen	1	3.100.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Terlaksannya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**%**	**100,00**	**5.000.000**	**100,00**	**119.700.000**	**100,00**	**150.000.000**	**100,00**	**150.000.000**	**100,00**	**150.000.000**	**100,00**	**150.000.000**	**100,00**	**150.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.14.03.2.02.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	1	5.000.000	1	119.700.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase PUS yang mendapat pelayanan KB**	**%**	**70,36**	**3.138.861.000**	**70,43**	**6.185.554.000**	**70,50**	**6.060.808.000**	**71,07**	**7.269.654.000**	**71,14**	**7.269.654.000**	**71,21**	**7.269.654.000**	**71,28**	**7.269.654.000**	
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	4	8.920.000	6	15.000.000	4	18.000.000	4	21.600.000	4	21.600.000	4	21.600.000	4	21.600.000	
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	10	6.385.000	304	108.456.000	10	130.147.200	10	156.176.640	10	156.176.640	10	156.176.640	10	156.176.640	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Laporan	1	3.935.000	1	17.000.000	1	20.400.000	1	24.480.000	1	24.480.000	1	24.480.000	1	24.480.000	
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1	12.230.000	2	130.000.000	1	156.000.000	1	187.200.000	1	187.200.000	1	187.200.000	1	187.200.000	
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	14	3.063.861.000	10	5.719.654.000	14	5.501.728.000	14	6.598.758.000	14	6.598.758.000	14	6.598.758.000	14	6.598.758.000	
2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Orang	350	43.530.000	1.470	195.444.000	14	234.532.800	14	281.439.360	14	281.439.360	14	281.439.360	14	281.439.360	
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Persentase organisasi kemasyarakatan peduli KB**	**%**	**100,00**	**6.772.000**	**100,00**	**1.314.400.000**	**100,00**	**150.000.000**	**100,00**	**150.000.000**	**100,00**	**150.000.000**	**100,00**	**150.000.000**	**100,00**	**150.000.000**	
2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	2	**5.000.000**	5	1.314.400.000	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung		**1.772.000**													
2.14.03.2.03.0017	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Kegiatan	0	-	-	-	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan keluarga sejahtera**	**Pesentase kelembagaan ketahanan keluarga aktif**	**%**	**100,00**	**1.569.471.725**	**100,00**	**873.940.000**	**100,00**	**2.248.240.000**	**100,00**	**873.940.000**	**100,00**	**873.940.000**	**100,00**	**873.940.000**	**100,00**	**873.940.000**	
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persesntase desa/kelurahan yang memiliki kelompok Tribina aktif**	**%**	**100,00**	**1.559.331.725**	**100,00**	**873.940.000**	**100,00**	**2.248.240.000**	**100,00**	**873.940.000**	**100,00**	**873.940.000**	**100,00**	**873.940.000**	**100,00**	**873.940.000**	
2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan	1	48.239.025													

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.14.04.2.01.0015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	Terlaksananya aktifitas lansia sesuai tujuh dimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	Kegiatan	-	-	-	-	2	60.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan / Dokumen	-	-	-	-	14	98.000.000	14	15.000.000	14	15.000.000	14	15.000.000	14	15.000.000	
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	-	-	-	-	1	120.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Unit	25	306.500.000	15	195.000.000	20	195.000.000	30	195.000.000	30	195.000.000	30	195.000.000	30	195.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orang	4188	503.910.000	222	222.000.000	223	320.000.000	223	222.000.000	223	222.000.000	223	222.000.000	223	222.000.000	
2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Orang	-	-	-	-	100	20.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Laporan	5	622.080.000	4	425.940.000	4	425.940.000	4	215.940.000	4	215.940.000	4	215.940.000	4	215.940.000	
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Orang	222	76.600.000	223	31.000.000	225	74.500.000	225	31.000.000	225	31.000.000	225	31.000.000	225	31.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.14.04.2.01.0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Laporan	-	-	-	-	1	30.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
2.14.04.2.01.0027	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Dokumen	-	-	-	-	1	120.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Balita (BKB) , Bina Keluarga Remaja (BKR) , Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) Bina Keluarga Lansia (BKL) , Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Terlaksananya Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Balita (BKB) , Bina Keluarga Remaja (BKR) , Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) Bina Keluarga Lansia (BKL) , Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kelompok	51	2.002.700												
2.14.04.2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Terlaksananya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase organisasi kemasyarakatan peduli Keluarga Beresiko Stunting**	**%**	**100,00**	**10.140.000**	**-**	**-**	**100**	**654.800.000**	**100,00**	**95.000.000**	**100,00**	**95.000.000**	**100,00**	**95.000.000**	**100,00**	**95.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Laporan	-	-	-	-	222	77.400.000	223	15.000.000	223	15.000.000	223	15.000.000	223	15.000.000	
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Laporan	-	-	-	-	1	442.400.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	
2.14.04.2.02.0007	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Laporan	-	-	-	-	1	60.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Laporan	1	10.140.000			1	75.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
2.14.04.3.03	**Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)**	**Terlaksananya Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)**	**Persentase remaja yang mendapatkan pembinaan dan sosialisasi PKBR**	**%**					**100,00**	**130.000.000**	**100,00**	**20.000.000**	**100,00**	**20.000.000**	**100,00**	**20.000.000**	**100,00**	**20.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.14.04.3.03.0003	Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya	Terlaksananya orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya	Jumlah Kegiatan Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya yang terlaksana	Laporan					223	130.000.000	223	20.000.000	223	20.000.000	223	20.000.000	223	20.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dukungan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang terhadap program prioritas Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	➢ Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya Kualitas dan PUG dan pemberdayaan Perempuan	a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	➢ Program Perlindungan Perempuan	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Perempuan	a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	➢ Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Meningkatnya Kulitas Pemenuhan Hak Anak (PHA)	a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kabupaten/Kota b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
	➢ Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
2	➢ Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya kualitas PSKS dalam pemberdayaan PPKS	a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota b. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota c. Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial d. Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah e. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota f. Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial g. Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	➢ Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya kualitas rehabsos bagi Pemerlu Pelayananan Kesejahtaraan Sosial (PPKS)	a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
	➢ Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Meningkatnya kualitas perlindungan dan pemberian jaminan sosial	a. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota c. Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP d. Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP	

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable)* mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang

https://jdih.pemalangkab.go.id

pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD sebagai berikut :

Tabel 4.4
Penetapan Indikator Kinerja Utama
DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Kabupaten
Pemalang Tahun 2025-2030

No.	Indikator Kinerja Utama DinaoaKBPP Kabupaten Pemalang	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra		Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Persentase PPKS yang ditangani	%	74,22	66,60	68,00	70,00	72,00	73,00	75,00	75,00	75,00
2	Indeks pencapaian SPM Sosial	Indeks	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	% KPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	IKM	Nilai		86,00	86,10	86,15	86,20	86,25	86,30	86,35	86,35
5	IPG	Indeks	87,14	87,37	87,45	87,50	87,55	87,60	87,65	87,70	87,70
6	IKG (indek ketimpangan gender)	Indeks	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,37	0,36	0,35	0,35
7	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya (780)	Utama (820)	Utama (850)	Utama (880)	Utama (900)	Utama (900)
8	LPP (laju Pertumbuhan Penduduk)	%	1,27	1,25	1,23	1,22	1,21	1,20	1,19	1,18	1,18
9	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jiwa	2,19	2,18	2,12	2,11	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10

https://jdih.pemalangkab.go.id

No.	Indikator Kinerja Utama DinaoaKBPP Kabupaten Pemalang	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra		Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Angka	62,08	62,77	63,60-64,81	64,29-64,32	65,05-65,10	65,80-65,87	66,56-66,64	67,32-67,41	67,32-67,41
11	IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	Angka	-	64,30	65,10	65,90	66,70	67,50	68,30	69,10	69,10

4.3 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Selain IKU, terdapat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atau Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.5
Penetapan Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	IKG (Indeks Ketimpangan Gender)	Angka	0,336	0,336	0,319	0,315	0,310	0,305	0,300	0,295	0,295
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	64,34	0	65	65,35	66,7	66,95	67,2	67,5	67,5
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	93,31	93,31	93,41	93,51	93,61	93,71	93,81	93,91	93,91
4	IPKK (Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga)	Angka	-	-	73,81	74,08	74,34	74,61	74,87	75,14	75,14

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2,04	2,03	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
6	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	63,07	63,9	64,25	64,5	64,75	65	65,3	65,5	65,5
7	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	83,9	87,51	87,6	87,7	87,8	87,9	88	88,1	88,1
8	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Angka	2,75	2,92	2,93	2,95	2,98	3	3,05	3,08	3,08
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90,25	88,87	88,9	89	89,1	89,3	89,5	89,8	89,8

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB V
PENUTUP

Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2025 2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja, serta menjadi pedoman dasar dalam evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja tahunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini telah melalui proses diantaranya identifikasi permasalahan dan perumusan isu strategis, FGD internal dan eksternal, Forum Perangkat Daerah, verifikasi rancangan dengan Bappeda, reviu Inspektorat, serta verifikasi akhir dengan Bappeda. Saran dan masukan tetap diharapkan untuk perbaikan Renstra ke depan, sehingga manfaatnya tidak hanya dapat dirasakan oleh aparatur Pemerintah Kabupaten Pemalang saja, namun juga *stakeholder* terkait dan masyarakat selaku penerima pelayanan publik.

Renstra menjadi pedoman bagi seluruh Unit Kerja di Lingkungan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang selama 5 (lima) tahun kedepan. Seluruh Sekretariat, Bidang dan UPTD PPPA Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang berkewajiban mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang berkewajiban untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Renstra Tahun 2025 2029 dengan sebaik-baiknya sehingga indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai;
2. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Tahun 2025 2029, melalui Sekretariat, Bidang dan UPTD PPPA Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan;
3. Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja 5 (lima) tahun, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari upaya mendukung RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Provinsi Kabupaten Pemalang.

Adapun rencana tindak lanjut sebagai fokus kegiatan yang akan dilakukan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang selama periode tahun 2025-2029 antara lain :

1. Pemenuhan ASN dengan usulan sesuai formasi yang dikebutuhan;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.
4. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang wajib berpedoman pada Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
6. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan komitmen, dukungan, kesungguhan, tanggungjawab serta kerjasama yang erat dari seluruh pemangku kepentingan yang terkait di Kabupaten Pemalang untuk terwujudnya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra ini, mendukung tercapainya visi **"PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA"**.

Pemalang, September 2025
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten
Pemalang Kabupaten Pemalang,

Drs. MU'MINUN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680526 199403 1 005

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah serta dapat memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Setiap instansi pemerintah, termasuk Perangkat Daerah didalamnya, wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra PD berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah. Renja PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Penyusunan Renstra PD harus selaras dengan RPJMD dan RPJMN. Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan implementasi dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mengampu urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil perlu menyusun Renstra PD. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen

https://jdih.pemalangkab.go.id

perencanaan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang serta sebagai alat bantu dan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan serta strategi dan kebijakan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas tahun 2025-2029. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, dimana kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang harus mendukung kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai. Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang merupakan bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih yang dilaksanakan secara simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Proses penyusunan Dokumen Renstra Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cra Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Adapaun proses penyusunan Renstra PD meliputi beberapa tahapan, yaitu:

(1) Persiapan Penyusunan Renstra PD, terdiri dari pembentukan tim penyusun Renstra PD, orientasi mengenai Renstra PD, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra PD, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD;
(2) Perumusan Rancangan Awal Renstra PD;
(3) Perumusan Rancangan Renstra PD;

https://jdih.pemalangkab.go.id

(4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;

(5) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD; dan

(6) Penetapan Renstra PD.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang disusun melalui penyelarasan dengan berbagai dokumen perencanaan yang ada, utamanya dengan RPJMD, RPJPD , RPJMN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, RPJMD Prov Jateng , serta Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah. Secara Rinci Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut :

Gambar 1.1

Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

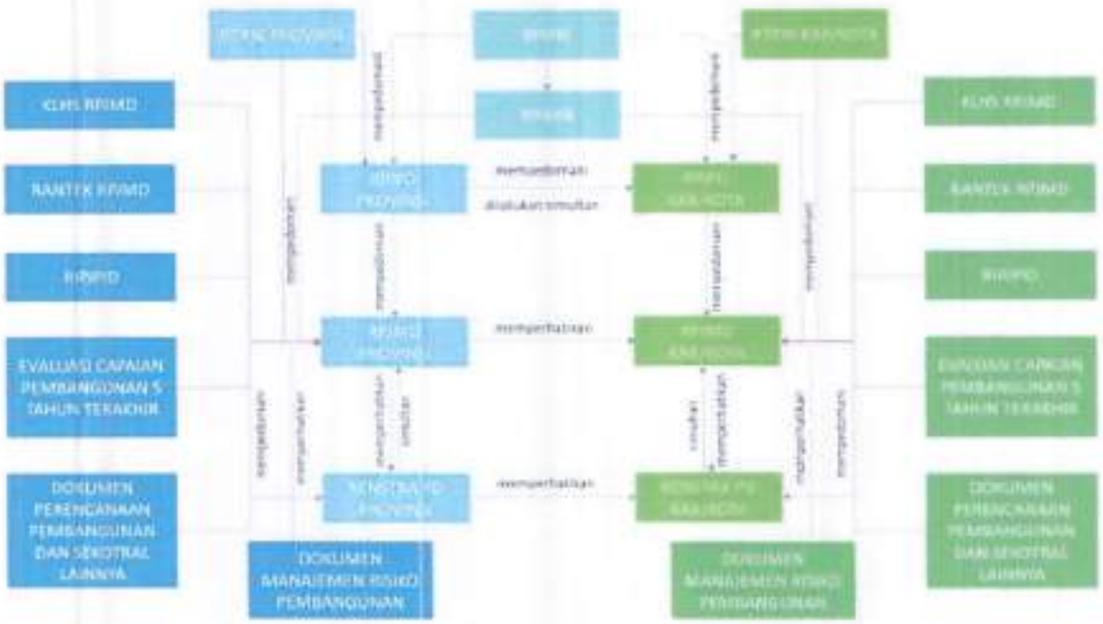

Sumber : inmendagri No. 2 Tahun 2025

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah

https://jdih.pemalangkab.go.id

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

https://jdih.pemalangkab.go.id

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

https://jdih.pemalangkab.go.id

16. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
17. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
18. Peraturan Presiden Republik 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
19. Peraturan Presiden No.39 Tahun 2023 tentang Manajemen Resiko Pembangunan Nasional;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

https://jdih.pemalangkab.go.id

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
29. Instruksi Menteri Dalan Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 01);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 98);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 10, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah: (10-186/2020);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daeah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 7, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah: (7-191/2022);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 141, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang. Provinsi Jawa Tengah: (12-283/2024);
37. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
38. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada pengyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan
2. Memberikan arahan dalam melayani masyarakat sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Pemalang dalm meujudakn tujuan dan sasaran yang telah disepakati bersama.

https://jdih.pemalangkab.go.id

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Memberikan arah tujuan,sasaran,strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Disdukcapil Tahun 2025-2029 ;
2. Menyediakan tolok ukur keinerja pelaksanaan program,kegiatan,dan sub kegiatan Disdukcapil Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan ecvaluasi kekinerja Disdukcapil Kabupaten Pemalang;
3. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Disdukcapil Kabupaen Pemalang dalam memuat program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2026 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan sistematika sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan

   Pada bab ini memuat tentang latar belakang,dasar hukum penyusunan rencana strategis, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan tentang uraian ringkas masing- masing bab dalam rencana strategis.

2. BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

   Pada bab ini berisi tentang gambaran pelayanan Perangkat Daerah yang memuat tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah; sumber daya Perangkat Daerah; kinerja pelayanan perangkat daerah; Kelompok sasaran layanan; Mitra PD dalam pemberian pelayanan; kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah dan berisi permasalahan

https://jdih.pemalangkab.go.id

dan Isu strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat:Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan Isu strategis.

3. BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

   Pada Bab ini memuat tentang tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029; Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029; Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; danArah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

4. BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

   Pada bab ini memuat uraian program,uraian kegiatan;
   uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
   tartget keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

5. BAB V Penutup

   Bagian ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat daerah

2.1.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Pemerintah Daerah tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya disebut Disdukcatpil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang. Disdukcapil merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah. Disdukcapil dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun susunan organisasi Disdukcapil berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 tahun 2023 sebagai berikut:

a. Kepala Dinas,
b. Sekretariat, terdiri dari:
   1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan
   2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk,
d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil,
e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data,
f. UPTD
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Pemalang

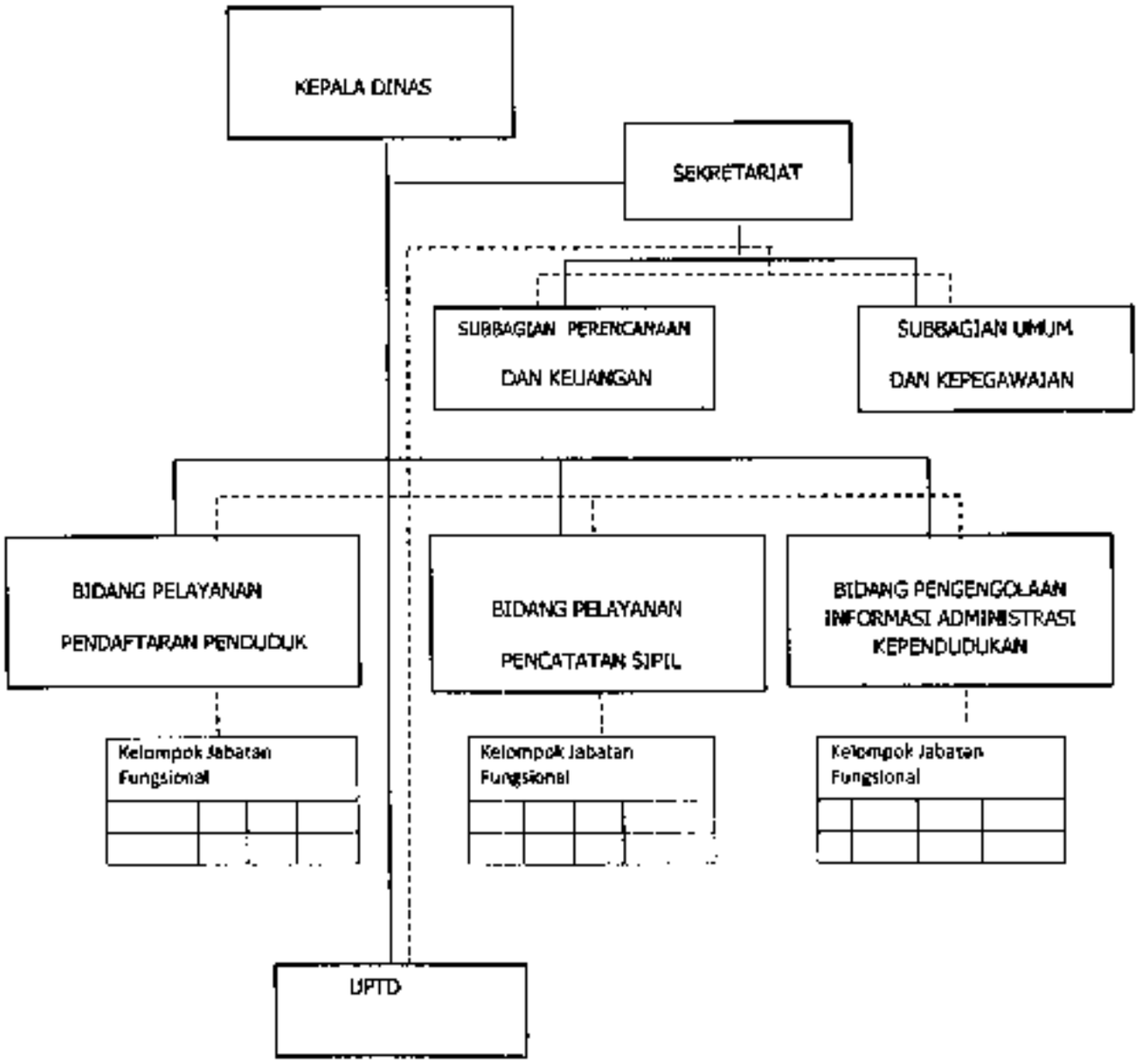

Keterangan :

——— : Garis Hierarki

- - - - - - - - : Garis Koordinasi

Sumber : Perbup Kabupaten Pemalang No. 41 Tahun 2023

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang dipimpin oleh Kepala

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkdudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjwab secara langsung kepeda pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pemalang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Disdukcapil menyelenggarakan fungsi:

1) Perumusan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran kependudukan, pelayanan pencatatan sipil serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data,
2) pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran kependudukan, pelayanan pencatatan sipil serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data,
3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendaftaran kependudukan, pelayanan pencatatan sipil serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data,
4) pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya

Kepala Disdukcapil mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

https://jdih.pemalangkab.go.id

2. Merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).
3. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
6. Mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan unsur SPIP.
7. Mengarahkan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
8. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
9. Merumuskan inovasi daerah urusan pemerintah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
10. Merumuskan laporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang yang meliputi sumber daya manusia/ kepegawaian dan sarana prasarana sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

a. Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Jumlah pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang berjumah 106 yang tersaji dalam tabel berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.1

Data Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Pemalang

No	Uraian	L	P	Golongan				Jumlah
				I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	-	-	-	-	0
3	Kepala Bidang	2	-	-	-	2	-	2
4	Kasubag/ Kasi	-	2		-	2	-	2
5	JFU	18	9	-	7	20	-	27
6	JFT	3	-	-	-	2	1	3
Jumlah ASN		**24**	**11**		**7**	**26**	**2**	**35**
7	Non ASN	46	25	-	-	-	-	**71**
Jumlah ASN dan Non ASN		**70**	**36**		**7**	**26**	**2**	**106**

Sumber : Sekretariat Disdukcapil Kab. Pemalang 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang pada Tahun 2025 mempunyai pegawai sebanyak 106 orang yang meliputi pegawai ASN dan Non ASN. Jumlah ASN sebanyak 35 orang dengan jumlah laki-laki sejumlah 24 orang dan perempuan 11 orang. Sedangkan pegawai non ASN jumlh 71 terdiri atas pegawai laki-laki sejumlah 46 orang dan perempuan 29 orang.

Tabel 2.2

Data Pegawai Berdasar Diklat Kepemimpinan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Diklatpim II	1	1	-
2	Diklatpim III	-	-	-
3	Diklatpim IV	2	2	
4	ADUM	-	-	-
5	SEPADA	0	-	-
6	Struktural yang belum diklat	4	2	2
Jumlah		**7**	**5**	**2**

Sumber : Sekretariat Disdukcapil Kab. Pemalang, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bila dilihat berdasarkan pegawai yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan menunjukkan bahwa ada 1 (satu) pejabat yang telah mengikuti diklatpim I dan 2 pegawai yang telah mengikuti Diklatpim II sedangkan yang belum mengikuti Diklatpim dikarenakan menunggu penyelenggaraan diklat dari instansi yang berwenang.

Tabel 2.3

Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pasca Sarjana (S2)	4	4	-
2	Sarjana (S1)	15	9	6
3	Diploma	5	-	5
4	SLTA	11	11	
5	SLTP	0	-	-
6	SD	0	-	-
Jumlah ASN		**35**	**24**	**11**
1	Sarjana (S1)	37	20	17
2	Diploma	4	3	1
3	SLTA	27	20	7
4	SLTP	3	3	
Jumlah NON ASN		**71**	**46**	**25**

Sumber : Sekretariat Disdukcapil Kab. Pemalang, 2025

Jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang sebanyak 106, secara kuantitas SDM di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang sudah tercukupi

Tabel 2.4

Data Pegawai Berdasar Tingkat Eselon

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	IIIA	-	-	-
2	IIIB	2	2	-
3	IVA	2		2
4	IVB	0	-	-
Jumlah		**4**	**2**	**2**

Sumber : Sekretariat Disdukcapil Kab. Pemalang, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pejabat struktural berdasarkan tingkat eselon, yaitu Eselon III A sebanyak 0 orang, Eselon III B sebanyak 2 orang, Eselon IV A sebanyak 2 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pejabat struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang berdasarkan tingkat eselon presentase eselon IIIB dan IV A adalah sama

b. Sarana dan Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana pelayanan yang tersedia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang masih kurang memadai dan perlu peremajaan terutama pada 14 Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) yang ada, sehingga masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan administrasi kependudukan. Secara lengkap, jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5

Inventaris Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
1	Lemari	14	-	5	9
2	Filling Cabinet Besi	14	-	3	11
3	AC Cassete	6	6	0	0
4	AC Split	34	8	14	12
5	Kursi Kerja	41	14	17	10
6	Kursi Tunggu	44	10	20	14
7	Meja kerja	43	1	42	0
8	Printer Laserjet	46	11	25	10
9	Genset	1	1	-	-
10	Personal Computer (PC)	56	33	23	10
11	Laptop	9	5	2	2
12	Printer Laserjet	28	18	4	6
13	Printer Inkjet	17	4	13	-
14	Alat Perekaman KTP el (Mobile Enrolment)	3	3	-	-
15	Printer KTP el	9	5	2	2

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
16	Barcode Reader	20	20	-	-
17	Signature Pad	17	14	3	-
18	Scanner Iris Mata	17	14	3	-
19	Fingerprint Scanner	17	15	-	2
20	Camera	16	16	-	-
21	Rak Server	1	-	1	-
22	Firewall	1	-	1	-
23	Server Storage	1	-	1	-
24	UPS	2	2	-	-
	JUMLAH	457	200	179	78

Sumber : Sekretariat Disdukcatpil Kab. Pemalang

Dilihat dari tabel di atas maka asset yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang yang dalam kondisi baik sebesar 43,76 %, sedang sebesar 39,17 % dan rusak 17,07 %, sehingga secara keseluruhan bisa dikategorikan cukup baik.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Disdukcapil Tahun 2020-2024 terlihat pada Tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
Berdasarkan Renstra Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)		√		92,65	99,86	99,89	99,90	99,91	99,87	99,45	99,89	99,95	99,95	107	99,57	100	100	100
2	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)		√		NA	25	30	34	40	21,01	37,52	40,24	51,36	60,88	NA	150	134	151	152
3	Kepemilikan Kartu Keluarga			√	97,13	98,45	98,50	98,55	98,70	98,44	99,18	99,18	99,93	99,51	101,35	100,74	100,69	101,4	100,82
4	Kepemilikan Akta Kelahiran		√		81,48	92,50	93	93,5	94	94,21	99,23	93,69	98,12	99,69	115,62	107,27	100,74	105	106
5	Penerbitan Akta Kematian			√	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	142,86	100	100	100	100
6	Penerbitan Akta Perkawinan			√	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Penerbitan Akta Perceraian			√	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Kepemilikan Akta Kelahiran Keseluruhan			√	NA	82,06	92,56	83,06	88,56	81,56	81,78	82,99	83,70	85,01	NA	101,13	100,52	100,77	101,73
9	Kualitas Data Kependudukan yang Mutakhir			√	NA	92	93	94	95	98,85	98,02	95,98	100	100	NA	106,54	103,2	106,38	105,26
10	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan /kerjan sama		√		NA	25,64	41,03	56,41	71,79	10,26	25,64	41,03	56,41	71,79	NA	100	100	100	100

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
11	Proporsi anak di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh Lembaga pencatatan sipil			√	NA	93,50	94	94,5	95	93,04	98,70	93,60	97,30	97,95	NA	105,58	99,57	102,96	103
12	Tersedianya Data Registrasi terkait kelahiran dan kematian			√	NA	96,25	96,50	96,75	97	91,64	90,89	96,85	98,65	99,54	NA	94,43	100,36	101,96	102,62
13	Penyajian Data Kependudukan Skala Kabupaten dalam 1 tahun			√	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Pemanfaatan Data Kependudukan			√	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15	Reformasi Birokrasi			√	NA	69	72	74	76	62,18	72,45	58,98	0	0	NA	105	81,92	0	0
16	SAKIP			√	NA	53	55	57	59	30,90	54,18	62,90	63,70	65,47	NA	102,22	114,36	111,75	110,97
17	SKM			√	81	76	79	80	81	77,02	80,49	82,50	87,06	92,64	95,08	105,19	104,4	108,82	114,37
18	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan			√	NA	72,55	77,10	83,65	86,20	70,19	75,55	78,76	84,92	88,82	NA	104,13	102,25	104	102,56
19	Presentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan			√	NA	74,44	76,18	77,82	79,50	73,11	78,72	79,77	83,75	86,75	NA	105,75	104,78	107,62	109,11
20	Presentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil			√	NA	98,13	98,25	98,38	98,50	98,55	99,81	98,42	99,53	99,77	NA	100,69	100,17	101,17	101,3

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dari 20 (dua puluh) indikator berdasarkan Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang berdasarkan Renstra Tahun 2020 – 2024 realisasinya sebagian besar telah mencapai target yang ditetapkan atau lebih dari 100 persen hal ini karena Disdukcapil menyelenggarakan pelayanan jemput bola, *home visit* dan layanan inovasi. Pada Tahun 2021 untuk indikator kinerja Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el) dan Tersedianya Data Regristrasi terkait kelahiran dan kematian di bawah target karena pandemi covid19. Demikian juga pada tahun 2022 untuk indikator Proporsi anak di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh Lembaga pencatatan sipil.

Tabel 2.7

Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Pemalang Berdasarkan Renstra Tahun 2025 - 2029

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el)		√		99,90	99,91	99,92	99,93	99,94	99,95
2	Presentase cakupan anak usia 0-17 kurang 1 (satu) hari yang memiliki Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)		√		60	62	64	66	68	70
3	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga			√	99,52	99,53	99,54	99,55	99,56	99,57
4	Kepemilikan identitas kependudukan Digital			√	10	15	20	25	30	35
5	Kepemilikan Akta Kelahiran		√		99,10	99,20	99,30	99,40	99,50	99,60
6	Persentase cakupan kepemilikan akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan			√	100	100	100	100	100	100
7	Penerbitan Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan			√	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan			√	100	100	100	100	100	100

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan /kerja sama		√		73	77	80	83	87	90
10	Persentase data profil kependudukan yang disusun			√	100	100	100	100	100	100

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang adalah seluruh penduduk yang menjadi obyek pelayanan Disdukcapil. Secara umum, semua warga negara yang memiliki kebutuhan terkait administrasi kependudukan menjadi sasaran Disdukcapil, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pelayanan yang disediakan.

Secara lebih rinci, kelompok sasaran tersebut meliputi:

1) Penduduk yang melakukan pelayanan administrasi kependudukan (semua penduduk yang membutuhkan layanan seperti penerbitan KTP, KK, perubahan data kependudukan dll),
2) Penduduk yang memerlukan layanan pencatatan sipil (penduduk yang membutuhkan layanan terkait peristiwa penting kelahiran, kematian,perkawinan dan perceraian),
3) Penduduk yang membutuhkan layanan khusus (Orang sakit, lanjut usia, disabilitas, ODGJ),
4) Penduduk yang membutuhkan layanan terkait kepemilikan dokumen kependudukan,
5) Penduduk yang tinggal di luar negeri (melalui layanan konsuler di perwakilan RI di luar negeri,
6) Orang asing yang memiliki izin tinggal di Indonesia.

a. Mitra Perangkat daerah

Mitra perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) adalah instansi-instansi atau lembaga yang bekerja sama dengan Disdukcapil dalam berbagai kegiatan, terutama terkait

https://jdih.pemalangkab.go.id

pelayanan dan pemanfaatan data kependudukan (OPD di Kabupaten Pemalang, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Kementrian Agama , Pengadilan Agama, Satuan Tingkat Pendidikan Menengah/SMA).

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, menjumpai adanya permasalahan yang menjadi hambatan dalam pengembangan pelayanan, sehingga dalam pelaksanaan urusan administrasi kependudukan belum dapat dilakukan secara optimal. Adapun permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Belum tercapainya kepemilikan dokumen kependudukan;
2. Pemanfaatan data kependudukan yang belum maksimal;
3. Kurangnya kapasitas dan kecakapan Petugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan;
4. Belum tercapainya target kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Rumusan permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.8
Identifikasi Permasalahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

Urusan/ Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Belum tercapainya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Masih ada masyarakat yang belum mempunyai dokumen kependudukan
		Lokasi geografis tempat tinggal masyarakat pemohon yang jauh dari tempat pelayanan administrasi kependudukan
		Sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai
	Belum semua desa melakukan pelayanan	Belum optimalnya peran petugas PAD/PAK
	Pemanfaatan data kependukan belum maksimal	Rendahnya pemahaman pentingnya pemanfaatan data kependudukan
		Sosialisasi adminduk belum menjangkau semua unsur lapisan masyarakat
		Belum seluruh penduduk terjangkau hak-hak layanan publik yang terintegrasi dengan data kependuduka

https://jdih.pemalangkab.go.id

Urusan/ Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum tercapainya aktivasi IKD (Identitas Kependudukan Digital)	Rendahnya minat pengunaan IKD
		Kurangnya sosialisasi pemanfaatan IKD

2.2.2 Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang.

Tabel 2.9

Perumusan Isu Stretegis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat daerah	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Adanya komitmen dari pimpinan daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.	Masih rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan	Belum optimalnya budaya egovernment	*Cyber security*	Tata kelola pemerintahan belum optimal	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Peningkatan Kualitas Pelayanan adminduk
Digitalisasi Pelayanan Publik	Belum tercapainya target aktivasi IKD					Masih Rendahnya capaian IKD

Mengacu pada isu-isu strategis yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pemalang, maka dapat diidentifikasi isu strategis yang harus diselesaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

1. **Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil** yaitu pelayanan yang selalu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan perkembanagan teknologi informasi. Dalam era saat ini pelayanan administrasi kependudukan mempunyai tuntutan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin maju antara lain:
   - Mendekatkan dan memudahkan Pelayanan Kepada Masyarakat

https://jdih.pemalangkab.go.id

- Pelaksanaan Pelanduk Desa aktif disemua desa/kelurahan
- Pelaksanaan Pelayaanan online melaui aplikasi LAKONE
- Peningkatan layanan dengan Inovasi Layanan Adminduk
- Pengembangan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur

2. **Semua Penduduk wajib memiliki dokumen kependudukan**

   Semua Penduduk tercatat atau teregristrasi dalam database kependudukan

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB III
TUJUAN, SASARAN,STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang pelayanan publik, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di urusan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara proaktif berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan pelayanan publik yang prima.

Tujuan Renstra Disdukcapil Kabupaten Pemalang berdasar pada sasaran Daerah Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025- 2029. Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah : **"PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA"**. Visi ini memiliki pembentuk kata:

1. **Bersih** : Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan.
2. **Cakap** : dimaknai memiliki sumber daya manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif

https://jdih.pemalangkab.go.id

dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.

3. **Handal** : dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh **disclenggarakan** oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.
4. **Mulya** : Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yaitu **RHAPSODI (Resik,Hijau, Apik,Peduli,Silaturahmi,Organisatoris,Digitalisasi dan Ikhlas**) dengan penjelasan sebagai berikut :

1. **Resik**: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih.
   Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik.
2. **Hijau**: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sektor unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau, yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan) yang ramah lingkungan, industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM dimasyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

3. **Apik**: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penaatan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dari Desa.
4. **Peduli**: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi.
5. **Silaturahmi**: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong,tepa selira dan sejahtera.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, dan saling menghormati dan teposliro.
6. **Organisatoris:** meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan *Good Governance, Clean Governance* dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.
7. **Digitalisasi**: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi.
8. **Ikhlas**: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkan kearifan dan budaya lokal.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Keterkaitan Visi dengan Misi adalah sebagai berikut:

Frase Bersih dan Handal dalam Visi akan dicapai dengan **Misi 1 Resik:** menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih; **Misi 6 Organisatoris**: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi dan **Misi 7 Digitalisasi:** memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar

Frase Cakap dalam Visi akan dicapai dengan **Misi 2 Hijau:** meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan; **Misi 3 Apik:** meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah dan **Misi 4 Peduli:** meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat

Frase MULYA dalam Visi akan dicapai dengan **Misi 5 Silaturahmi**: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera dan **Misi 8 Ikhlas**: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang, Disdukcapil Kabupaten Pemalang mendukung visi **Bersih dan Handal** dan **Misi Organisatoris** (meningkatkan pelayanan publik yang mudah, murah, cepat dan transparan) serta **Misi Digitalisasi** (memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi) dengan pelayanan adminduk secara Online melaui aplikasi LAKONE dan IKD (Identitas Kependudukan Digital) yang selanjutnya dicapai melalui tujuan daerah **Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel** serta sasaran daerah **Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik.**

Mendasari sasaran Daerah berupa meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik, Disdukcapil Kabupaten Pemalang merumuskan tujuan jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2025–2029, yaitu "**Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang prima**". Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pencatatan Sipil sebagai perangkat daerah yang mengoordinasikan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan. Tujuan tersebut diukur dengan indikator Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Akta, KK, KTP, KIA). Adapun sasaran yang akan dicapai serta hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pemalang adalah **"Meningkatnya kualitas Pelayanan adminduk"** dengan indiktor Cakupan Layanan adminduk yang merupakan rerata dari pendaftaran penduduk,pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pengelolan profil kependudukan. Keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra Disdukcapil Kabupaten Pemalang dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1
Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

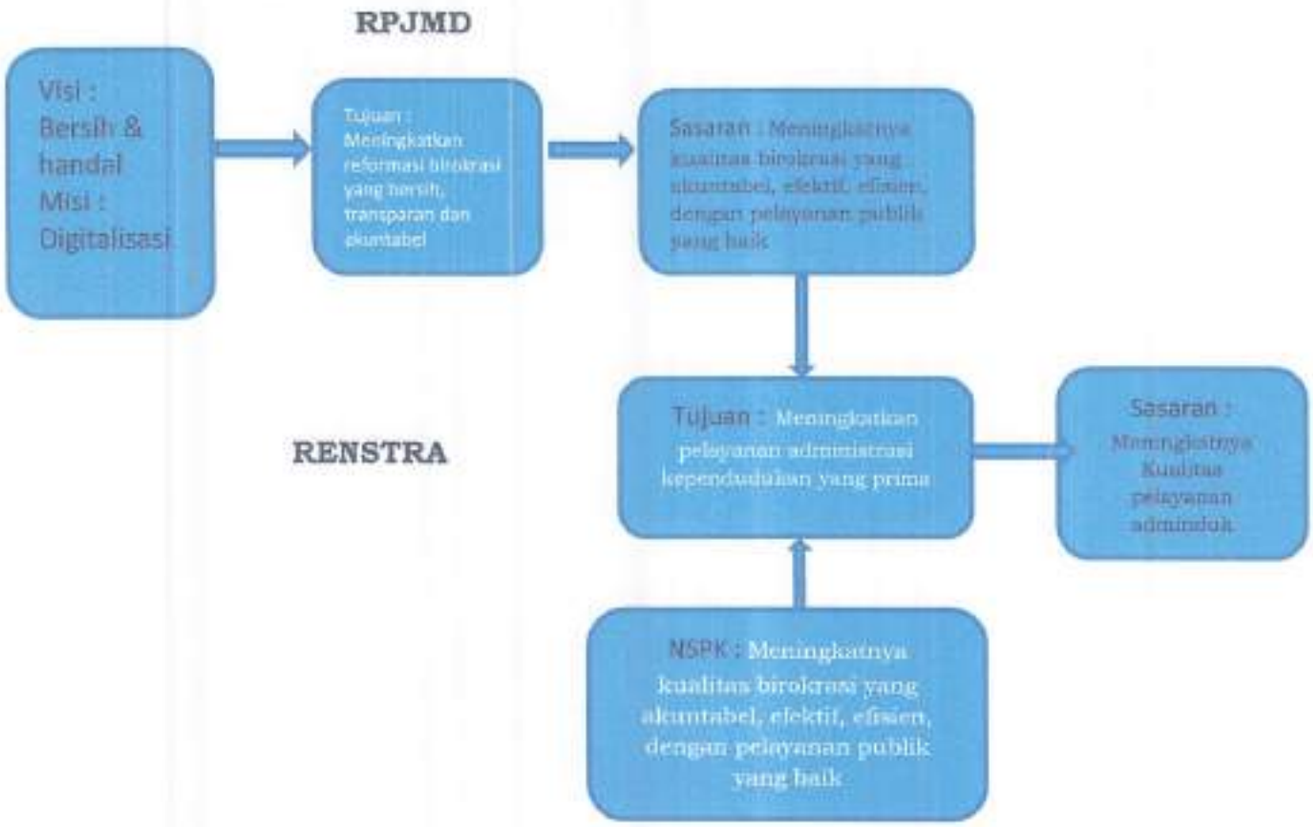

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Baseline Tahun	Target Capaian						Ket
					2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik	Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang prima		Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Akta, KK, KTP, KIA)	%	93,26	93	93,5	93,75	94	94,5	95	
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	88,82	90,75	91	91,50	92	92,50	93	
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan dan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Indeks kepuasan masyarakat	%	92,64	92	92,75	92,85	92,95	93,05	93,15	
			Nilai Sakip OPD	skor	65,47	70,05	70,5	71,00	71,5	72,00	72,5	

https://jdih.pemalangkab.go.id

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran PD akan dilaksanakan. Sedangkan Kebijakan merupakan Pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran PD.

Strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang dijabarkan sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan

Pencapaian sasaran ini melalui strategi :

a. Meningkatkan kualitas SDM
b. Pemenuhan Kebutuhan Sarana prasarana
c. Inovasi Pelayanan

Dalam rangka mendukung program prioritas Kepala Daerah yaitu **Santunan Kematian,** strategi yang dilaksanakan Disdukcapil Kabupaten Pemalang terkait administrasi kependudukan dalam hal ini akta kematian antara lain :

a. melaksanakan pendekatan pelayanan sampai ke desa melalui inovasi pelanduk desa yang pelaksanaanya oleh Fasilitator Adminduk Desa /Kelurahan (FAD/FAK.)
b. Peningkatan sosialisasi tentang akta kematian agar ada yang melaporkan mereka yang meninggal melalui keluarga/Ketua RT.
c. Mendesak para kades dan pengurus pemakaman umum untuk aktif mengelola Buku Pokok Pemakaman (BPP)

Untuk memfokuskan pada dukungan pencapaian visi dan misi daerah, maka pelaksanaan aktivitas pencapaian tujuan dan sasaran Disdukcapil dilakukan penahapan yang selaras dengan penahapan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.2

Pentahapan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan kualitas pelayanan dan pemenuhan sarana prasarana	Peningkatan kapasitas SDM	Penguatan layanan adminduk melalui digitalisasi dan pendekatan layanan	Tata Kelola Pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik	Terwujudnya keluarga sadar adminduk

Tabel 3.3

Teknis Merumuskan Arah Kebijakan Renstra

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)
		Peningkatan kualitas pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan kepuasan pada masyarakat	1. Meningkatan kebutuhan sarana prasarana pelayanan yang memadai 2. Mengembangkan Kemampuan aparatur dengan mengikuti diklat-diklat teknis dan managerial pelayanan 3. Mendekatkan Pelayanan (terjangkau, mudah, tepat,transparan,akuntabel, ada kepastian waktu) 4. Optimalisasi Pemanfatan layanan secara Online 5. Merespon dangan cepat adanya pengaduan masyarakat 6. Tersusunnya Standar Pelayanan Publik yang akomodatif terhadap kebutuhan Masyarakat 7. Mengembangkan layanan inovasi 8. Tersusunnya data agregat kependudukan dan profil kependudukan

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

   Program ini diarahkan untuk pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
   c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      1) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

https://jdih.pemalangkab.go.id

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   7) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
   8) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan
   2) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
   3) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   4) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Lainnya

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan untuk mencatat dan mendata penduduk serta menerbitkan dokumen kependudukan yang dilaksanakan melaui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

https://jdih.pemalangkab.go.id

1) Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
2) Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
3) Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan

b. Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk
1) Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan

c. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
1) Sub Kegiatan Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk

3. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan untuk mencatat dan mengelola data kependudukan serta peristiwa penting dalam kehidupan penduduk,yang dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil
1) Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
2) Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

program ini untuk mengelola, memproses, dan menyajikan data kependudukan secara sistematis dan terpadu yang dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
1) Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
2) Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

b. Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
1) Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

https://jdih.pemalangkab.go.id

c. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1) Sub Kegiatan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2) Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
3) Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4) Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat

5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

a. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan

1) Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
2) Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.1
Sasaran, Program dan Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
Tahun 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya birokrasi yang akuntabel, efektif, dan efisien, dengan pelayanan publik yang baik	Meningkatkan Pelayanan Adminduk yang Prima				Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Akta, KK, KTP, KIA)		
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Adminduk			Cakupan Layanan Adminduk		
		Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah			IKM		
					Nilai SAKIP OPD		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1. Persentase layanan Umum dan Kepegawaian yang terpenuhi	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	
					2. Persentase dokumen perencanaan,keuangan dan evaluasi Kinerja sesuai Regulasi		
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				,penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai Regulasi	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi		
				Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	SKPD		
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kordinasi & Penyusunan Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	
				Tersusunnya Adminstrasi	Jumlah laporan / dokumen	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Keuangan Perangkat daerah sesuai Regulasi	keuangan tersusun sesuai regulasi		
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD.	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya	Jumlah orang yang	Bimbingan Teknis Implementasi	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi UmumPerangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi	Jumlah fasilitasi administratif perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai regulasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	
				Tersedianya	Jumlah dokumen	Penyediaan Bahan Bacaan dan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Peraturan Perundang-undangan..	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Opreasional atau lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Pengadaan mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	
				Tersedianya Sarana dan	Jumlah unit sarana dan	Pengadaan sarana prasarana Gedung lainnya	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		
				Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Oparasioanal atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Perorangan Dinas Oprasiaonal atau Lapangam	Pajaknya dan Perizinannya		
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan		1. Perekaman KTP elektronik, 2. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA, 3. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga, 4. Kepemilikan identitas kependudukan	**Program Pendaftaran Penduduk**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					digital		
					Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan	Pelayanan pendaftaran Penduduk	
				Terlaksananya pencatatan penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Pencatatan. Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas pendaftaran penduduk	
				Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
				Terlaksanaya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbiatan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	
				Terlaksananya penataan pendaftaran penduduk yang disediakan	Jumlah dokumen penataan pendaftaran penduduk yang disediakan	Penataan Pendaftaran Penduduk	
				Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait	Jumlah dokumen kependudukan selain Blangko KTP-EL, formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EL, Formulir, dan Buku Terkat Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	dengan kebutuhan yang tersedia		
				Meningkatnya penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Jumlah dokumen penyelenggaraan pendaftaran kependudukan yang diterbitkan.	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
				Terlaksanaya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	
			Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil		1. Persentase kepemilikan akta kelahiran, 2. Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan, 3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan, 4. Persentase Akta Perceraian yang	**Program Pencatatan Sipil**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Diterbitkan bagi yang Melaporkan		
				Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan		Pelayanan Pencatatan Sipil	
					Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	
					Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	
			Meningkatnya OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kinerja		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	
				Terlaksananya kerjasama pemanfaatan Data kependudukan	Jumlah dokumen pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan yang disusun.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
				Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Kerjasamaa Pemanfaatan data kependudukan	jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	
				Terlaksananya pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah dokumen penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang disusun.	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
				Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen tata cara perencanaan,pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang disusun	Penyusunan Tata cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administtrasi Kependudukan	
				Terfasilitasinya pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah laporan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang disusun	Penyelenggaraan Pengelolaaan Informasi Administrasi Kependudukan	
				Terlaksananya Koordinasi Antar	Jumlah laporan hasil koordinasi	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah dikabupaten/kota dalam penerbitan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengeloaan	
				Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Fasilitasi terkait Pengeloaaan Informasi Administrasi Kependudukan	
				Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Sosialisasi terkait Pengeloaaan Informasi Administrasi Kependudukan	
				Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	
			Meningkatnya pelayanan pemanfaatan data kependudukan		Persentase data profil kependudukan yang disusun	**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah dokumen profil kependudukan yang tersusun		Penyusunan Profil Kependudukan	
				Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data kependudukan kabupaten/kota	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/ Kota	
				Tersusunya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pemalang

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Lokasi
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			-	7,301,639,000		9,408,699,303		9,408,699,303		9,408,699,303		9,408,699,303	Kabupaten Pemalang
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi		100	6,668,031,000	100	7,967,132,303	100	7,967,132,303	100	7,967,132,303	100	7,967,132,303	Kabupaten Pemalang
	2 Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi		100		100		100		100		100		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10,500,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	Kabupaten Pemalang
Keluaran Kegiatan	Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun sesuai Regulasi	9 dokumen	14		14		14		14		15		
Hasil Kegiatan	Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang berkualitas		100		100		100		100		100		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2	3,500,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	3	5,000,000	Kabupaten Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Lokasi
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1	1,000,000	1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,500,000	Kabupaten Pemalang
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1	1,000,000	1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,500,000	Kabupaten Pemalang
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1	1,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	Kabupaten Pemalang
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1	1,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	Kabupaten Pemalang
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	4	1,000,000	4	3,000,000	4	3,000,000	4	3,000,000	4	3,000,000	Kabupaten Pemalang
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	4	1,000,000	4	3,000,000	4	3,000,000	4	3,000,000	4	3,000,000	Kabupaten Pemalang
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5,006,925,000		5,507,925,000		5,507,925,000		5,507,925,000		5,507,925,000	Kabupaten Pemalang
Keluaran Kegiatan	Dokumen Keuangan yang disusun sesuai ketentuan	14 dokumen	13		13		13		13		13		
Hasil Kegiatan	Tertibnya administrasi keuangan perangkat daerah		100		100		100		100		100		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang/ 12 bulan	36/12	5,004,925,000	36/12	5,484,880,000	36/12	5,484,880,000	36/12	5,484,880,000	36/12	5,484,880,000	Kabupaten Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCAME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Lokasi
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1	1,000,000	1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,500,000	Kabupaten Pemalang
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan	3	1,000,000	3	1,500,000	3	1,500,000	3	1,500,000	3	1,500,000	Kabupaten Pemalang
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				21,010,000		42,020,000		42,020,000		42,020,000		42,020,000	Kabupaten Pemalang
Keluaran Kegiatan	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	260 Orang	109		110		110		110		110		
Hasil Kegiatan	Tertibnya Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	%	100		100		100		100		100		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	260 orang	109	21,010,000	110	42,020,000	110	42,020,000	110	42,020,000	110	42,020,000	Kabupaten Pemalang
Administrasi Umum Perangkat Daerah				268,780,000		612,599,000		612,599,000		612,599,000		612,599,000	Kabupaten Pemalang
Keluaran Kegiatan	Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi	7 layanan	8		8		8		8		8		
Hasil Kegiatan	Meningkatnya efektifitas pelayanan internal perangkat daerah	%	100		100		100		100		100		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Lokasi
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(3)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	4	2,575,000	4	2,575,000	4	2,575,000	4	2,575,000	4	2,575,000	Kabupaten Pemalang
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- paket	1	3,500,000	3	10,500,000	3	10,500,000	3	10,500,000	3	10,500,000	Kabupaten Pemalang
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	4	1,000,000	4	1,000,000	4	1,000,000	4	1,000,000	4	1,000,000	Kabupaten Pemalang
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 paket	10	162,093,000	10	412,093,000	10	412,093,000	10	412,093,000	10	412,093,000	Kabupaten Pemalang
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 paket	6	7,281,000	6	7,281,000	6	7,281,000	6	7,281,000	6	7,281,000	Kabupaten Pemalang
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	Kabupaten Pemalang
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	Kabupaten Pemalang
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	28	86,337,000	36	173,150,000	36	173,150,000	36	173,150,000	36	173,150,000	Kabupaten Pemalang
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				68,440,000		280,200,000		280,200,000		280,200,000		280,200,000	Kabupaten Pemalang
Keluaran Kegiatan	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	24 Unit	8		16		16		16		16		
Hasil Kegiatan	Meningkatnya dukungan sarana prasarana bagi kelancaran tugas Perangkat daerah	%	100		100		100		100		100		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCAME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Lokasi
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	Unit		-	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	Kabupaten Pemalang
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit	2	12,000,000	5	30,000,000	5	30,000,000	5	30,000,000	5	30,000,000	Kabupaten Pemalang
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	48,440,000	9	217,200,000	9	217,200,000	9	217,200,000	9	217,200,000	Kabupaten Pemalang
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	8,000,000	1	8,000,000	1	8,000,000	1	8,000,000	1	8,000,000	Kabupaten Pemalang
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,193,720,000		1,335,236,303		1,335,236,303		1,335,236,303		1,335,236,303	Kabupaten Pemalang
Keluaran Kegiatan	Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 layanan	3		3		3		3		3		
Hasil Kegiatan	Meningkatnya kualitas operasional Pemerintah Daerah	%	100		100		100		100		100		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12	4,000,000	12	4,000,000	12	4,000,000	12	4,000,000	12	4,000,000	Kabupaten Pemalang
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	48	208,000,000	48	248,000,000	48	248,000,000	48	248,000,000	48	248,000,000	Kabupaten Pemalang
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12	981,720,000	12	1,083,283,303	12	1,083,283,303	12	1,083,283,303	12	1,083,283,303	Kabupaten Pemalang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				98,650,000		170,150,000		170,150,000		170,150,000		170,150,000	Kabupaten Pemalang
Keluaran Kegiatan	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	119 unit	85		85		85		85		85		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCAME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Lokasi
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Hasil Kegiatan	Terjaminnya ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang layak	%	100		100		100		100		100		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 unit	33	37,400,000	33	67,400,000	33	67,400,000	33	67,400,000	33	67,400,000	Kabupaten Pemalang
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	1 unit	3	7.500.000	3	7.500.000	3	7.500.000	3	7.500.000	3	7.500.000	Kabupaten Pemalang
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 unit	35	23,750,000	46	35,250,000	46	35,250,000	46	35,250,000	46	35,250,000	Kabupaten Pemalang
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 unit	2	25,000,000	2	55,000,000	2	55,000,000	2	55,000,000	2	55,000,000	Kabupaten Pemalang
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	12	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Kabupaten pemalang
Program Pendaftaran Penduduk		66,48%	69,11	186,300,000	70,87	833,257,000	72,62	833,257,000	74,38	833,257,000	76,13	833,257,000	Kabupaten Pemalang
	1) Perekaman KTP elektronik	99,95%	99.91		99.92		99.93		99.94		99.95		
	2) Persentase anak usia 0-17 tahunkurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	60,88%	62		64		66		68		70		
	3) Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	99,51%	99.53		99.54		99.55		99.56		99.57		
	4) Kepemilikan identitas kependudukan digital	5,56%	15		20		25		30		35		
Pelayanan Pendaftaran Penduduk				126,300,000		743,257,000		743,257,000		743,257,000		743,257,000	Kabupaten Pemalang
Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen pelayanan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	89,412 dokumen	89,400		89,400		89,400		89,400		89,400		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Lokasi
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Hasil Kegiatan	Persentase dokumen pelayanan pendaftaran penduduk yang diterbitkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100		100		100		100		100		
Pencatatan, Penetapan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penetapan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	75.000 dokumen	75,000	9,000,000	75,000	9,500,000	75,000	9,500,000	75,000	9,500,000	75,000	9,500,000	Kabupaten Pemalang
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 laporan	12	172,800,000	12	720,257,000	12	720,257,000	12	720,257,000	12	720,257,000	Kabupaten Pemalang
Pencatatan, Penetapan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penetapan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	14.400 dokumen	14,400	8,500,000	14,400	13,500,000	14,400	13,500,000	14,400	13,500,000	14,400	13,500,000	Kabupaten Pemalang
Penataan Pendaftaran Penduduk				10,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000	Kabupaten Pemalang
Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen penataan pendaftaran penduduk yang ditetapkan	1 dokumen	1		1		1		1		1		
Hasil Kegiatan	Persentase dokumen penataan pendaftaran penduduk yang ditetapkan tepat waktu	%	100		100		100		100		100		
Penyediaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 dokumen	1	10,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	Kabupaten Pemalang
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				50,000,000		70,000,000		70,000,000		70,000,000		70,000,000	Kabupaten Pemalang
Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	7.500 dokumen	3,000	50,000,000	4,000	70,000,000	4,000	70,000,000	4,000	70,000,000	4,000	70,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCAME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Lokasi
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Hasil Kegiatan	Persentase dokumen penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang diterbitkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100		100		100		100		100		
Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	7.500 dokumen	3,000	50,000,000	4,000	70,000,000	4,000	70,000,000	4,000	70,000,000	4,000	70,000,000	Kabupaten Pemalang
Program Pencatatan Sipil		99,77 %	99,80	48,790,000	99,83	80,996,000	99,85	80,996,000	99,88	80,996,000	99,90	80,996,000	Kabupaten Pemalang
	1) Kepemilikan akta kelahiran	99,09	99,2		99,3		99,4		99,5		99,6		
	2) Persentase cakupan kepemilikanakta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100%	100		100		100		100		100		
	3) Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100%	100		100		100		100		100		
	4) Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100%	100		100		100		100		100		
Pelayanan Pencatatan Sipil				48,790,000		80,996,000		80,996,000		80,996,000		80,996,000	Kabupaten Pemalang
Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil yang diterbitkan	32.000 dokumen	32.000		32.000		32.000		32.000		32.000		
Hasil Kegiatan	Persentase dokumen pelayanan pencatatan sipil yang diterbitkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100		100		100		100		100		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCAME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Lokasi
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	32.000 dokumen	32,000	16,455,000	32.000	26,455,000	32.000	26,455,000	32.000	26,455,000	32.000	26,455,000	Kabupaten Pemalang
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2 layanan	4	32,335,000	4	54,541,000	4	54,541,000	4	54,541,000	4	54,541,000	Kabupaten Pemalang
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	71.79%	77	386,118,000	80	493,612,000	83	493,612,000	87	493,612,000	90	493,612,000	Kabupaten Pemalang
Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				17,463,000		27,463,000		27,463,000		27,463,000		27,463,000	Kabupaten Pemalang
Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan yang disusun	18 dokumen	17		18		18		18		18		
Hasil Kegiatan	Persentase dokumen pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan yang disusun tepat waktu	%	100		100		100		100		100		
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 dokumen	12	8,360,000	12	13,360,000	12	13,360,000	12	13,360,000	12	13,360,000	Kabupaten Pemalang
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	6 dokumen	5	9,103,000	6	14,103,000	6	14,103,000	6	14,103,000	6	14,103,000	Kabupaten Pemalang
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				4,500,000	1	7,500,000	1	7,500,000	1	7,500,000	1	7,500,000	Kabupaten Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Lokasi
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang disusun	1 dokumen	1		1		1		1		1		
Hasil Kegiatan	Persentase dokumen penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang disusun tepat waktu	%	100		100		100		100		100		
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1 dokumen	1	4,500,000	1	7,500,000	1	7,500,000	1	7,500,000	1	7,500,000	Kabupaten Pemalang
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				364,155,000		458,658,000		458,658,000		458,658,000		458,658,000	Kabupaten Pemalang
Keluaran Kegiatan	Jumlah laporan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang disusun	27 laporan	23		4		4		4		4		
Hasil Kegiatan	Persentase laporan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang disusun tepat waktu	%	100		100		100		100		100		
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan	6 laporan	5	9,055,000	6	13,055,000	6	13,055,000	6	13,055,000	6	13,055,000	Kabupaten Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCAME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Lokasi
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Informasi Administrasi Kependudukan												
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 laporan	12	308,000,000	12	358,103,000	12	358,103,000	12	358,103,000	12	358,103,000	Kabupaten Pemalang
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8 laporan	8	40,000,000	8	80,000,000	8	80,000,000	8	80,000,000	8	80,000,000	Kabupaten Pemalang
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 laporan	2	7,500,000	2	7,500,000	2	7,500,000	2	7,500,000	2	7,500,000	Kabupaten Pemalang
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase data profil kependudukan yang disusun	100	100	12,400,000	100	33,693,000	100	33,693,000	100	33,693,000	100	33,693,000	Kabupaten Pemalang
Penyusunan Profil Kependudukan				12,400,000		33,693,000		33,693,000		33,693,000		33,693,000	Kabupaten Pemalang
Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen profil kependudukan yang disusun	2 dokumen	2		2		2		2		2		
Hasil Kegiatan	Persentase dokumen profil kependudukan yang akurat dan mutakhir	%	100		100		100		100		100		
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1	9,400,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan lain yang tersusun	1 dokumen	1	3,000,000	1	3,693,000	1	3,693,000	1	3,693,000	1	3,693,000	Kabupaten Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
1	**Program Pendaftaran Penduduk**	Meningkatknya kepemilikan dokumen kependudukan	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	
			Pencatatan,Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	
			Peningkatan Pelayaan Pendaftaran Penduduk	
			Pencatatan,Penatausahaan dan Penerbitan dokumen atas Pelaporan Peristiwa kependudukan	
			Penataan Pendaftaran Penduduk	
			Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
			Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	
2	**Program Pencatatan Sipil**	Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	
			Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	

4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Disdukcapil Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	TARGET						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Cakupan layanan Adminduk	%	90,75	91	91,5	92	92,5	93	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	92	92,,75	92,85	92,99	93,05	93,15	
3	Nilai SAKIP OPD	%	70	70,5	71	71.5	72	72,5	

4.3 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Th 2025-2029 melalui IKK

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat dilihat pada tabel :

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Perekaman KTP elektronik	%	99,91	99,92	99,93	99,94	99,95	99,96	
2	Persentase anak usia 1-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	60	62	64	66	68	70	
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	99,1	99,2	99,3	99,4	99,5	99,6	
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjian kerjasama	%	73	77	80	83	87	90	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang merupakan dokumen perencanaan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang serta sebagai alat bantu dan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan serta strategi dan kebijakan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas tahun 2025-2029 serta merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati Pemalang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yaitu "PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA" dan Misi RHAPSODI (Resik, Hijau, Apik, Peduli, Silaturahmi, Organisatoris, Digitalisasi dan Ikhlas)

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Disdukcapil Kabupaten Pemalang 2025 -2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029. Atas dasar itu, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Disdukcapil Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur pada Disdukcapil melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya
2. Seluruh aparatur baik ASN maupun Non ASN pada Disdukcapil dapat menjalin koordinasi dan kerja sama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Disdukcapil telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Pemalang.
4. Renstra Disdukcapil akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dilaksanakan secara periodik
6. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.3 Pedoman Transisi

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang berlaku untuk kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2025–2029 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Disdukcapil dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2045.

Pemalang, September 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

Drs. Hendro Susilo, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19681227 199001 1 002

https://jdih.pemalangkab.go.id

POHON KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN PEMALANG

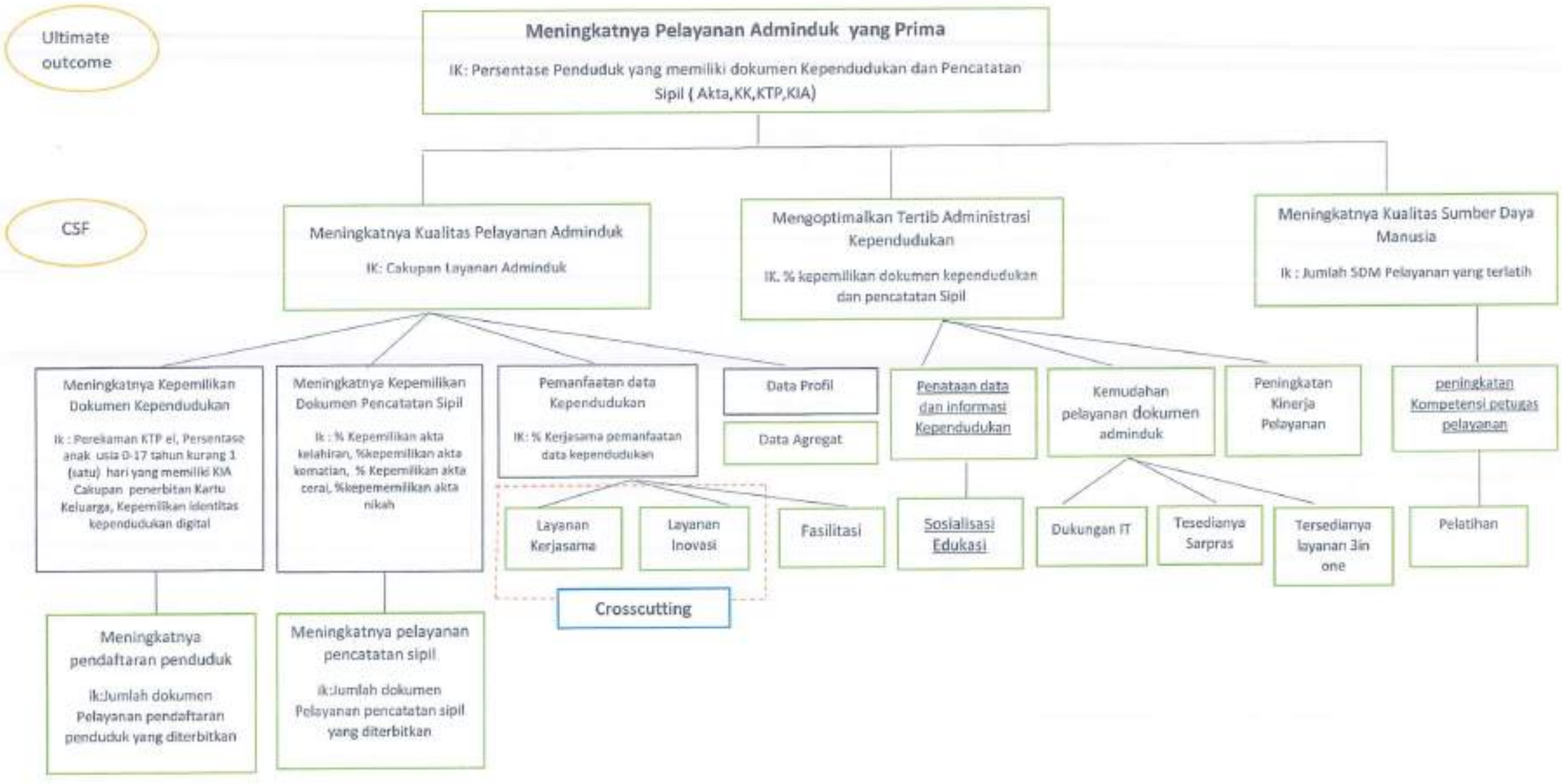

https://jdih.pemalangkab.go.id

Cascading Disdukcapil 2025-2029

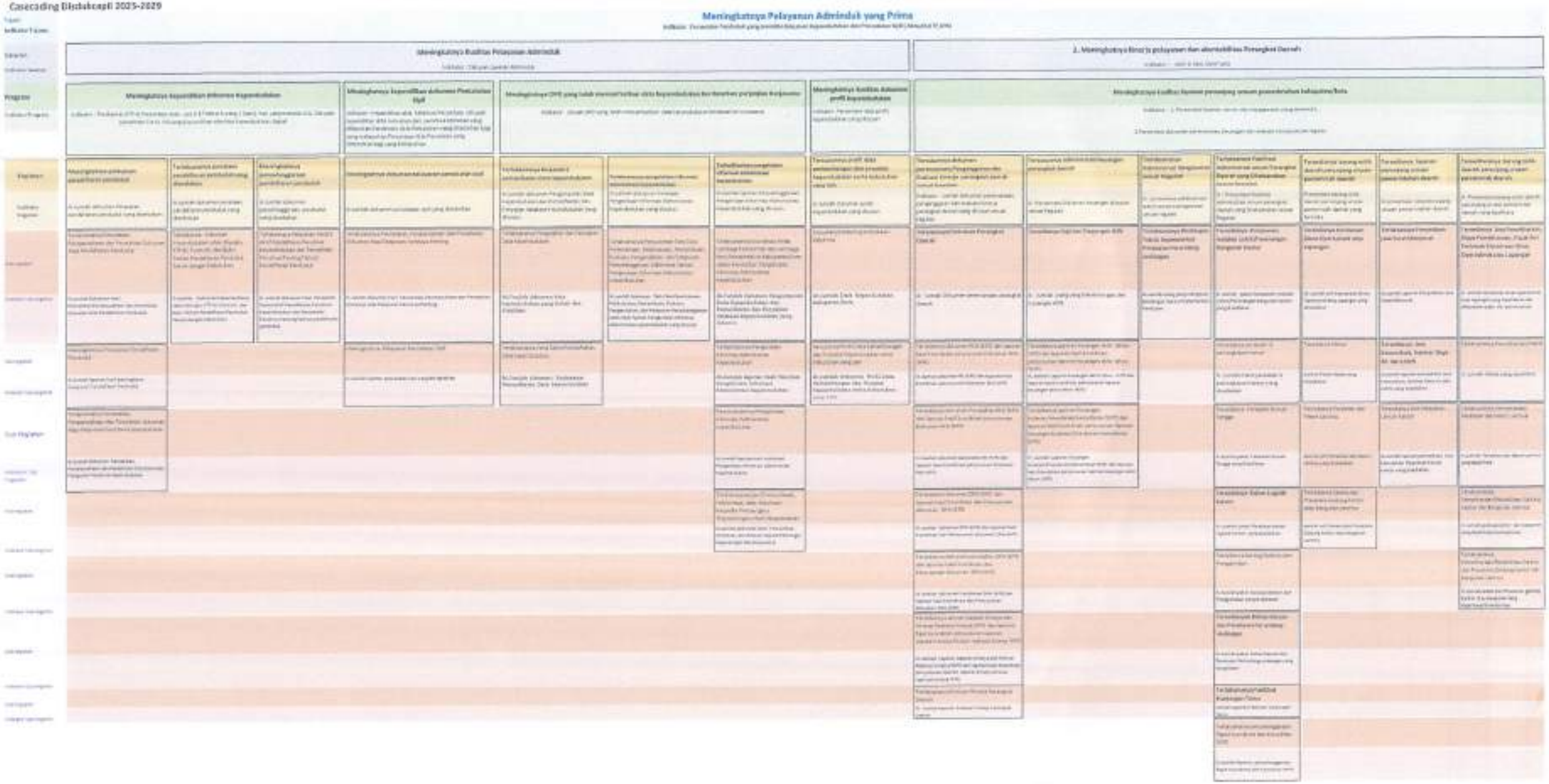

https://jdih.pemalangkab.go.id

BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR: 100.3.3.2/182/ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025–2029,
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026, DAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2029, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026, dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a dan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tahapan persiapan penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah diawali dengan penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.pemalangkab.go.id

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2045;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026, dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menginterpretasikan visi, misi, dan RPJMD ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah serta menyusun arah kebijakan dan strategi program perangkat daerah yang mendukung pencapaian RPJMD;
b. menghimpun dan menganalisis dokumen, data, dan informasi pendukung untuk perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menerjemahkan target tahunan Renstra Perangkat Daerah ke dalam Renja tahun 2026;
d. mengintegrasikan hasil musrenbang dan pokok pikiran DPRD yang relevan dengan tugas dan fungsi Perangkat

Dipindai dengan CamScanner

Daerah;

e. melakukan harmonisasi Renja antar Perangkat Daerah melalui Forum Perangkat Daerah;

f. merumuskan dan menyusun dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Lingkup Pemerintah Kabupaten Pemalang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. melakukan pengendalian kebijakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Pemalang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal

BUPATI PEMALANG,

ANOM WIDIYANTORO

Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.pemalangkab.go.id

Daerah;

e. melakukan harmonisasi Renja antar Perangkat Daerah melalui Forum Perangkat Daerah;

f. merumuskan dan menyusun dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Lingkup Pemerintah Kabupaten Pemalang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. melakukan pengendalian kebijakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Pemalang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal

BUPATI PEMALANG,

ANOM WIDIYANTORO

Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR: 100.3.3.2/182/TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029, RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026, DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029, RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026, DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

1. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Sekretaris Daerah
2.	Wakil Ketua	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi Umum
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Keuangan
	b. Anggota	1. Kepala Bagian Tata Usaha 2. Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Program Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat	
	a. Ketua	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
	b. Anggota	1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Umum 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Program Perekonomian dan Pembangunan	
	a. Ketua	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	b. Anggota	1. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan 2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	a. Ketua	Kepala Bagian Organisasi
	b. Anggota	1. Kepala Bagian Umum 2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 3. Kepala Subbagian Protokol 4. Pejabat Fungsional/Pelaksana

Dipindai dengan CamScanner
https://jdih.pemalangkab.go.id

2. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Sekretaris DPRD
2.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Program dan Keuangan
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Umum
4.	Anggota	1. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan 2. Kepala Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat 3. Kepala Subbagian Keuangan 4. Kepala Subbagian Tata Usaha 5. Pejabat Fungsional/Pelaksana

3. INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Inspektur
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Program, Keuangan dan Umum
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
	b. Anggota	1. Subkoordinator Perencana dan Bina Program 2. Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Penyelenggaraan Pengawasan	
	a. Ketua	Inspektur Pembantu I
	b. Anggota	1. Inspektur Pembantu Wilayah II 2. Auditor 3. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUD) 4. Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
	a. Ketua	Inspektur Pembantu Wilayah III
	b. Anggota	1. Inspektur Pembantu Wilayah Khusus 2. Auditor 3. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUD) 4. Pelaksana

4. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Keuangan

Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini 2. Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan Dan Masyarakat 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Sekolah Dasar 2. Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Sarana Prasarana	
	a. Ketua	Kepala Bidang Sarana Prasarana
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan, dan Kemasyarakatan 2. Kepala Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja V Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Mutasi Tenaga Pendidik 2. Kepala Seksi Pengembangan Profesi Tenaga Pendidik 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
9.	Kelompok Kerja VI Bidang Kebudayaan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kebudayaan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional

5. DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pemuda dan Olah Raga	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Unit Pengelola Objek Wisata	
	a. Ketua	Kepala Unit
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

6. DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Kesehatan Masyarakat	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Kesehatan Masyarakat	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja V Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
9.	Kelompok Kerja VI Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

7. DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Dan Jaminan Sosial
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Rehabilitasi Sosial	
	a. Ketua	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja IV Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
9.	Kelompok Kerja V Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

8. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

9. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Penataan Desa	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Penataan Desa
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pemerintahan Desa	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemerintahan Desa
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

10. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
	Anggota	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Pelaksana

Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.pemalangkab.go.id

11. DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program Dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja III Bidang Koperasi	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Koperasi
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pemerintahan Desa	
	a. Ketua	Kepala Bidang Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Perdagangan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perdagangan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja V Bidang Perindustrian	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perindustrian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

12. DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi	
	a. Ketua	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
	a. Ketua	Kepala Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.pemalangkab.go.id

13. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua Pokja	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Penyelernggaraan *E-Government*	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Penyelernggaraan *E-Government*
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Statistik dan Persandian	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

14. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Sumber Daya Air	
	a. Ketua	Kepala Bidang Sumber Daya Air
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksan
6.	Kelompok Kerja III Bidang Bina Marga	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bina Marga
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Jasa Konstruksi, Cipta Karya, dan Tata Ruang	
	a. Ketua	Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Cipta Karya, dan Tata Ruang
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.pemalangkab.go.id

15. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Perumahan dan Pertanahan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perumahan dan Pertanahan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Kawasan Permukiman	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kawasan Permukiman
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

16. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Angkutan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Angkutan
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Angkutan Penumpang dan Barang 2. Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Keselamatan 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Lalu Lintas	
	a. Ketua	Kepala Bidang Lalu Lintas
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas 2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana

17. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas	
	a. Ketua	Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

18. DINAS PERTANIAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Ketahanan Pangan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
	a. Ketua	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Perkebunan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Perkebunan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
8.	Kelompok Kerja V Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
9.	Kelompok Kerja VI Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.pemalangkab.go.id

19. DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

20. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Perpustakaan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perpustakaan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Arsip	
	a. Ketua	Kepala Bidang Arsip
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

21. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Satpol PP
2.	Wakil Ketua	Sekretaris

Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pembinaan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pembinaan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan 2. Kepala Seksi Pengawasan, Penegakan dan Penindakan 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	
	a. Ketua	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Perlindungan dan Pemadam Kebakaran	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemadam Kebakaran
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Satuan Perlindungan dan Bina Potensi Masyarakat 2. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana

22. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
	a. Ketua	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja V Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
9.	Kelompok Kerja VI Unit Penelitian dan Pengembangan	
	a. Ketua	Kepala Unit
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

23. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Anggaran	
	a. Ketua	Kepala Bidang Anggaran
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran 2. Kepala Subbidang Evaluasi dan Penyusunan Anggaran 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Perbendaharaan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perbendaharaan
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Penatausahaan Pencarian Dana 2. Kepala Subbidang Penatausahaan Bendahara Umum Daerah 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Akutansi dan Aset Daerah	
	a. Ketua	Kepala Bidang Akutansi Dan Aset Daerah
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Akuntansi dan

Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		Pelaporan 2. Kepala Subbidang Aset Daerah 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana

24. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pelayanan dan Penataan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pelayanan dan Penataan
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Pelayanan dan Pendataan Pajak Daerah Lainnya 2. Kepala Subbidang Pelayanan dan Pendataan PBB-P2 dan BPHTB 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pengolahan Data dan Penetapan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengolahan Data dan Penetapan
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Analisa, Pengembangan dan Pengolahan Data 2. Kepala Subbidang Penetapan, Verifikasi dan Keberatan 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Penagihan dan Pengendalian	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Penagihan dan Pengendalian
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Penyuluhan dan Penagihan 2. Kepala Subbidang Pengendalian dan Pelaporan 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana

25. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Sekretaris

Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
6.	Kelompok Kerja III Bidang Mutasi dan Promosi	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Mutasi dan Promosi
	b. Anggota	Jabatan Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pengembangan Aparatur	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Pengembangan Aparatur
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja V Unit Bidang Disiplin dan Kinerja Aparatur	
	a. Ketua	Kepala Bidang Disiplin dan Kinerja Aparatur
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

26. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Pengarah
3.	Sekretaris	Kepala Pelaksana
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
	b. Anggota	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 2. Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Kedaruratan dan Logistik	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
	a. Ketua	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

27. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Badan
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Kesatuan Bangsa	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
7.	Kelompok Kerja V Unit Pelaksana Teknis Daerah	
	a. Ketua	Kepala UPTD
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

28. KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Dipindai dengan CamScanner

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

29. KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

30. KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

31. KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.pemalangkab.go.id

32. KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

33. KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi

Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

34. KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman Dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

35. KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

Dipindai dengan CamScanner
https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua Pokja	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabaat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

36. KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua Pokja	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi

Dipindai dengan CamScanner
https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		Pelayanan

37. KECAMATAN WARUNGPRING KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

38. KECAMATAN MOGA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan

Dipindai dengan CamScanner

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

39. KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

40. KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat

Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua Pokja	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

41. KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

BUPATI PEMALANG,

ANOM WIDIYANTORO

Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Pemuda Nomor 29, Mulyoharjo, Pemalang, Jawa Tengah 52313
Telepon (0284) 325822, Faksimile (0284) 325822
Laman : http :www.pemalangkab.go.id/disdukcatpil,
Pos-el : disdukcatpilpml@yahoo.co.id

Pemalang, 18 September 2025

Yth.
Inspektur Kabupaten Pemalang

di
Pemalang

Mendasari Surat dari Inspektur Pembantu I Kabupaten Pemalang tanggal 15 September 2025 Nomor 700.1.2/15/2025 Perihal Penyampaian Catatan Hasil Reviu (CHR) tentang Rencana Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, dengan catatan hasil reviu sebagai berikut :

I. HASIL REVIU :

Kepada Tim Penyusun Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 agar melakukan revisi/perbaikan pada rancangan akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029, yaitu :

1) Menyelaraskan Peraturan pada landasan hukum di Bab I agar urut sesuai dengan Tahun terbitnya.
2) Menambahkan target pada indikator tujuan **"Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Akta, KK, KTP, KIA)"** setiap tahun pada tabel 3.1 Bab III
3) Menyesuaikan indikator outcome Program antara Renstra dengan Raperda RPJMD Tahun 2026-2029.
4) Menambahkan Target Indikator Outcome pada program Pendaftaran Penduduk dan Program Pencatatan Sipil pada Renstra Tahun 2026-2029 agar sesuai dengan Raperda RPJMD Tahun 2026-2029.
5) Memperbaiki target dan pagu anggaran Renstra yaitu di Tahun 2026 agar sesuai dengan RPJMD tahun 2025-2029

II. TANGGAPAN :

Disampaikan dengan hormat bahwa terkait Hasil Reviu terhadap Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, kami sudah melakukan revisi/perbaikan dan telah berkoordinasi dengan BAPPEDA Kabupaten Pemalang . Pada dasarnya kami menerima dan setuju atas reviu yang disampaikan oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang dan melakukan penyesuaian sesuai arahan dari TIM Reviu dari Inspektorat Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Demikian tanggapan atas Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pemalang

Drs. HENDRO SUSILO, MAP
Pembina Utama Muda
NIP 19681227 199001 1002

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
INSPEKTORAT
Jalan Pemuda Nomor 44, Mulyoharjo, Pemalang Jawa Tengah 52313,
Telepon (0284) 321254, Faks. (0284) 322339
Laman www.inspektorat.pemalangkab.go.id

Pemalang, 15 September 2025

Nomor : 700.1.2/15/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penyampaian Catatan Hasil Reviu (CHR)**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pemalang.
di –
PEMALANG

Diberitahukan dengan hormat, bahwa sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Pemalang Nomor : 700.1.2.8/73/2025 tentang Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, kami telah melakukan Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, dengan catatan-catatan yang perlu mendapat perhatian dan tindaklanjut sebagaimana Catatan Hasil Reviu (CHR) terlampir :

Demikian untuk mendapat perhatian dan atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Inspektur Pembantu I

ZAINI DWI HANDOKO,SIP
Pembina Tingkat I
NIP. 19671005 198803 1 001

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
INSPEKTORAT
Jalan Pemuda Nomor : 44 telpon : (0284) 321254
Pemalang Kode Pos 52123

CATATAN HASIL REVIU

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) – DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 – 2029 PEMALANG TAHUN 2025 – 2029

Uraian Catatan Hasil Reviu

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Pemalang Nomor 700.1.2.8/73/2025. Tanggal 9 September 2025 untuk melaksanakan Reviu Renstra pada 6 Organisasi Perangkat Daerah, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

1. **Prosedur Penyusunan Dokumen Renstra – Perangkat Daerah**

   Rancangan Akhir Renstra – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang telah disusun dengan didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai, antara lain Raperda RPJMD Kabupaten Pemalang 2025 – 2029, daftar IKU dan Cascading Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang desk dengan BAPPEDA Kabupaten Pemalang.

   Kesimpulan:

   Penyusunan dokumen Renstra telah menggunakan dokumen-dokumen yang diperlukan dan didasari dengan ketentuan yang mengaturnya.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2. Penyajian Dokumen Renstra

Bab I Pendahuluan

Uraian Hasil Reviu

Dari hasil reviu diketahui bahwa dalam melakukan perumusan dan penyusunan rancangan akhir Renstra- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, Tim Penyusun pada prinsipnya telah mendasarkan pada beberapa dokumen sebagai berikut :

Kondisi belum sesuai dengan Permendagri No.86 Tahun 2017 Pasal 16 ayat (2) hurup b Renstra Perangkat daerah dan Renja Perangkat daerah disusun dengan Tahapan penyusunan rancangan awal

Pasal 114 ayat (1) Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan renstra Perangkat Daerah

Sedangkan sistematika Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang yang disajikan dalam Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 diketahui sebagai berikut :

No.	Uraian	Keterangan
1.	Bab I Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Maksud dan Tujuan 1.3. Sistematika Penulisan	Telah sesuai namun untuk landasan hukum perlu perbaikan yaitu peraturan ada yang belum diurutkan sesuai tahun
2.	Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat daerah dan isu strategis **2.a Gambaran pelayanan perangkat daerah** 2.1 Tugas,Fungsi, dan Struktur organisasi 2.2 Sumber Daya 2.3 Kinerja pelayanan PD(tmsk capaian SPM sesuai tupoksinyaa) 2.4 Kelompok sasaran layanan (bisa ditambahkan) 2.5 Mitra perangkat daerah 2.6 dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja 2.7 Kerjasama daerah **2.b Permasalahan dan Isu strategis PD** 2.1 Permasalahan pelayanan PD 2.2 Isu strategis	Sesuai
3.	Bab III. Tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan 3.1Tujuan renstra PD provinsi/kabupaten/kota tahun 2025-2026 Sasaran Renstra PD 3.2 Provinsi/Kabupaten/Kota 2025-2026	Sesuai

https://jdih.pemalangkab.go.id

	3.3 Strategis PD dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 3.4 Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra PD	
4.	Bab IV. Program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan 4.1 Uraian program 4.2 Uraian kegiatan 4.3 Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif 4.4 Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator kinerja (IKU) PD 4.6 Target kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui IKK	Sesuai
5.	Penutup	Sesuai

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dari hasil reviu diketahui bahwa Renstra- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang pada BAB II telah sesuai dengan Instruksi Mendagri No 2 Tahun 2025 namun ada beberapa tabel yang belum diisi secara komplit yaitu tabel 2.6 dan tabel 2.7.

Bab. III Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan pada Dinas Kesehatan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang, Disdukcapil Kabupaten Pemalang mendukung visi **Bersih dan Handal** dan **Misi Organisatoris** (meningkatkan pelayanan publik yang mudah, murah, cepat dan transparan) serta **Misi Digitalisasi** (memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi) dengan pelayanan adminduk secara Online melaui aplikasi LAKONE dan IKD (Identitas Kependudukan Digital) yang selanjutnya dicapai melalui tujuan daerah **Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel** serta sasaran daerah **Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik.**

Mendasari sasaran Daerah berupa meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik, Disdukcapil Kabupaten Pemalang merumuskan tujuan jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2025–2029,

https://jdih.pemalangkab.go.id

yaitu "**Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang prima**". Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai perangkat daerah yang mengoordinasikan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan. Tujuan tersebut diukur dengan indikator Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Akta, KK, KTP, KIA). Adapun sasaran yang akan dicapai serta hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pemalang adalah "**Meningkatnya kualitas Pelayanan adminduk**" dengan indiktor Cakupan Layanan adminduk yang merupakan rerata dari pendaftaran penduduk,pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukandan pengelolan profil kependudukan dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan hasil survei kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi kependudukan yang telah dilaksanakan BAB III dari hasil reviu diketahui bahwa masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki yaitu diantaranya :

a. Pada Tabel 3.1 di bawah ini Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bawah ini belum terurai target setiap tahun dari indikator tujuan" **Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Akta, KK, KTP, KIA)**"
b. Sesuai Instruksi Kemendagri Nomor 2 Tahun 2025 yaitu
   - ✓ Baseline pada tabel di bawah ini hanya tahun 2024,tidak perlu ada tahun 2023.
   - ✓ Kondisi Akhir diganti dengan keterangan.

RPJPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	Th 2025	Th 2026	Th 2027	Th 2028	Th 2029	Th 2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang bai	Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang prima		Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Akta KK, KTP, KIA)										
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	84,42	88,82	90,76	91	91,50	92	92,50	93	93

https://jdih.pemalangkab.go.id

			Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	%	87,05	92,64	92	92,75	92,86	93,95	93,05	93,15	93,16

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam BAB IV Nomor Tabel masih belum sesuai dengan Peraturan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra tahun 2025-2029 dan belum sesuai dengan Raperda RPJMD Tahun 2026-2029 yaitu masih terdapat beberapa kelemahan yaitu

1) Target Indikator Outcome pada program Pendaftaran Penduduk dan Program Pencatatan Sipil target tidak dijabarkan semuanya seperti pada Raperda RPJMD Tahun 2026-2029

No	RPJMD							Renstra PD						
	Program	Indikator Outcome	2026	2027	2028	2029	2030	Program	Indikator Outcome	2026	2027	2028	2029	2030
			Target	Target	Target	Target	Target			Target	Target	Target	Target	Target
1	Program Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP Elektronik	98,81	98,92	98,93	98,94	98,95	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan(Perekaman KTP elektronik, Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA, Cakupan penerbitan Kartu Keluarga, kepemilikan identitas kependudukan digital)	98,81	98,82	98,83	98,84	98,85
		Prosentase anak usia 0-17 Tahun kurang 1 (satu) hari yang	82	84	86	88	88			82	84	86	88	70
		Cakupan penerbitan kartu keluarga	96,5	98	98,5	97	97							
		Kepemilikan identitas kependudukan digital	15	20	25	30	35							
2	Program Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	99,7	99,3	99,4	99,5	99,6	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Kepemilikan akta kelahiran Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dan perkawinan kematian yang dilaporkan, Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang dilaporkan, Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang melaporkan	99,83	99,8	99,81	99,82	99,85
		Prosentase akta-akta kepemilikan lahir kematian dari penduduk kematian yang dilaporkan	100	100	100	100	100							
		Prosentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	100	100	100	100							
		Prosentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	100	100	100	100							
	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	77	80	83	87	90	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Perangkat OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	77	80	83	87	90

https://jdih.pemalangkab.go.id

	Program pengelolaan profil kependudukan	Persentase data profil kependudukan yang dikelola	100	100	100	100	100	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase data profil kependudukan yang dikelola	100	100	100	100	100

Pagu Anggaran

No	Program	RPJMD					RENSTRA				
		2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
		Pagu Anggaran	Pagu Anggaran	Pagu Anggaran	Pagu Anggaran	Pagu Anggaran	Pagu Anggaran	Pagu Anggaran	Pagu Anggaran	Pagu Anggaran	Pagu Anggaran
1	Program Pendaftaran Penduduk	633.257.000	633.257.000	633.257.000	633.257.000	633.257.000	185,300,000	633,257,000	633,257,000	633,257,000	633,257,000
2	Program Pencatatan Sipil	60.998.000	60.998.000	60.998.000	60.998.000	60.998.000	48.700.000	60.998.000	60.998.000	60.998.000	60.998.000
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	493.821.000	493.821.000	493.821.000	493.821.000	493.821.000	386,118,000	493,812,000	493,812,000	493,812,000	493,812,000
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	33.693.000	33.693.000	33.693.000	33.693.000	33.693.000	12,400,000	33,693,000	33,693,000	33,693,000	33,693,000

2) Pada Pagu Anggaran Tabel 4.1 dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2026 berbeda dengan Tabel 4.2 Pada Raperda RPJMD Tahun 2026-2029

Kepada Tim Penyusun Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 agar melakukan revisi/perbaikan pada rancangan akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029, yaitu :

1) Menyelaraskan Peraturan pada landasan hukum di Bab I agar urut sesuai dengan Tahun terbitnya.
2) Menambahkan target pada indikator tujuan **"Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Akta, KK, KTP, KIA)"** setiap tahun pada tabel 3.1 Bab III

https://jdih.pemalangkab.go.id

3) Menyesuaikan indikator outcome Program antara Renstra dengan Reperda RPJMD tahun 2026-2029.
4) Menambahkan Target Indikator Outcome pada program Pendaftaran Penduduk dan Program Pencatatan Sipil pada Renstra Tahun 2026-2029 agar sesuai dengan Raperda RPJMD Tahun 2026-2029.
5) Memperbaiki target dan pagu anggaran Renstra yaitu di Tahun 2026 agar sesuai dengan RPJMD tahun 2025-2029.

4. Tanggapan Instansi yang direviu

.....

.....

.....

.....

.....

5. Batas Waktu Pengembalian CHR

CHR yang telah ditanggapi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang diserahkan ke Inspektorat Kabupaten Pemalang paling lambat 3 hari sejak diterima oleh Perangkat Daerah.

Mengetahui :
a.n INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG
Pembantu Inspektur Wilayah I

ZAINI DWI HANDOKO, S.IP
Pembina TK.I
NIP. 19671005 198803 1 011

Ketua Tim Reviu,

SRI PANGASTUTI, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19691025 199503 2 002

https://jdih.pemalangkab.go.id

I. RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 217 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dibentuk dalam rangka membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Hal ini selaras dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang, bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DINPERMASDES) Kabupaten Pemalang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Sebagai institusi yang bertugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, Dinpermasdes Kabupaten Pemalang secara proaktif berperan dalam penguatan lembaga desa, penguatan lembaga ekonomi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Agar tujuan tersebut dapat tercapai harus didukung oleh perencanaan yang baik sehingga perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id

(Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

DINPERMASDES Kabupaten Pemalang sebagai salah satu PD harus menyusun Renstra. Penyusunan Renstra DINPERMASDES Kabupaten Pemalang merupakan bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih yang dilaksanakan simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Dinpermasdes Kabupaten Pemalang disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kemendagri, Renstra Kemendes dan Renstra Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinpermasdes Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Renstra Dinpermasdes Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Renstra menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di DINPERMASDES Kabupaten Pemalang selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Penyusunan Renstra DINPERMASDES Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan keterkaitan antara tujuan dan sasaran Daerah dengan tujuan dan sasaran Dinpermasdes Kabupaten Pemalang, dimana program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan DINPERMASDES Kabupaten Pemalang harus mendukung tujuan dan sasaran Daerah sehingga visi dan misi Daerah dapat tercapai.

Proses penyusunan Renstra meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1) Persiapan Penyusunan Renstra PD, terdiri dari

https://jdih.pemalangkab.go.id

pembentukan tim penyusun Renstra PD, orientasi mengenai Renstra PD, agenda kerja tim penyusun Renstra PD, penyiapan data dan informasi; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD; (3) Penyusunan Rancangan Renstra PD; (4) Forum Perangkat Daerah; (5) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD; dan (6) Penetapan Renstra PD.

Tahapan penyusunan Renstra DINPERMASDES Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disajikan dalam bagan berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra DINPERMASDES
Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Dokumen Renstra DINPERMASDES Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang. Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Gambar 1.2
Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah
Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

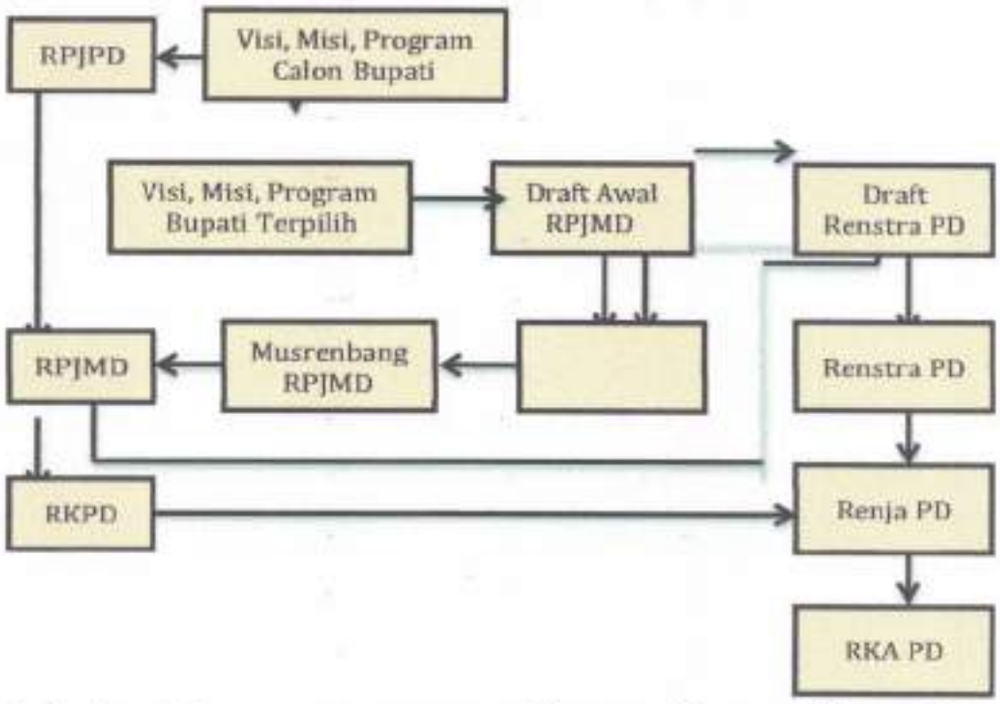

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan instrumen pertanggungjawaban kinerja PD, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinpermasdes Kabupaten Pemalang dan sekaligus langkah awal untuk melakukan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Renstra DINPERMASDES Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757;

https://jdih.pemalangkab.go.id

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6323);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6633);

https://jdih.pemalangkab.go.id

11) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6794;
12) Peraturan Presiden Republik 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
13) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1213);
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1419);
19) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahan 2025 tentang Pedoman Penyusnan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
21) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 24);

https://jdih.pemalangkab.go.id

22) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 10, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah: (10-186/2020));
23) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7);
24) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 Nomor 41).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan untuk mewujudkan visi dan misi, tujuan, sasaran Daerah yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinpermasdes Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh DINPERMASDES Kabupaten Pemalang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah di Unsur Penunjang Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi DINPERMASDES Kabupaten Pemalang serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Unsur Penunjang Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja DINPERMASDES Kabupaten Pemalang.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renstra Dinpermasdes Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2024, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan

https://jdih.pemalangkab.go.id

hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

2. Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinpermasdes Kabupaten Pemalang, berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinpermasdes Kabupaten Pemalang, sumber daya Dinpermasdes Kabupaten Pemalang, kinerja pelayanan Dinpermasdes Kabupaten Pemalang, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan, permasalahan, kelompok sasaran, mitra kerja dan isu strategis Dinpermasdes Kabupaten Pemalang.
3. Bab III Tujuan dan Sasaran, berisi tujuan, sasaran, strategis serta arah kebijakan Dinpermasdes Kabupaten Pemalang dalam dalam 5 (lima) tahun mendatang.
4. Bab IV Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan, berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, berisi indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci Dinpermasdes Kabupaten Pemalang yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang.
5. Bab V Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renstra Dinpermasdes Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINPERMASDES KABUPATEN PEMALANG

2.1 Gambaran Pelayanan DINPERMASDES Kabupaten Pemalang

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DINPERMASDES Kabupaten Pemalang

DINPERMASDES Kabupaten Pemalang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DINPERMASDES Kabupaten Pemalang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

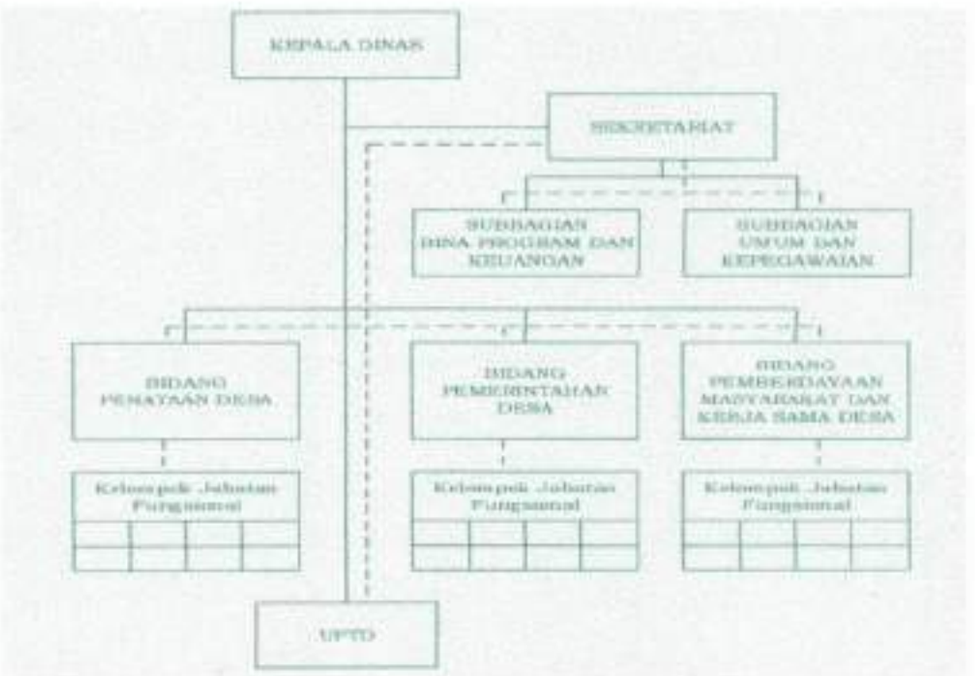

Sumber Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023

DINPERMASDES merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. DINPERMASDES mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang terdiri dari : (1) Sub Urusan Penataan Desa yaitu penyelenggaraan

https://jdih.pemalangkab.go.id

penataan desa; (2) Sub Urusan Kerja Sama Desa yaitu fasilitasi kerja sama antar desa dalam 1 (satu) daerah; (3) Sub Urusan Administrasi Pemerintahan Desa yaitu pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa; dan (4) Sub Urusan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat, meliputi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat daerah dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah, dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa. Sedangkan fungsi DINPERMASDES adalah perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang, maka uraian tugas jabatan struktural pada DINPERMASDES Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

A. Kepala DINPERMASDES

Kepala DINPERMASDES mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
3. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

https://jdih.pemalangkab.go.id

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

4. Mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa agar penyelenggaraan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
5. Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai kebutuhan pelayanan publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik;
6. Mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi;
7. Mengarahkan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraan tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
8. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan rencana program dalam kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
9. Merumuskan inovasi daerah urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
10. Merumuskan laporan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Sekretaris

Sekretaris DINPERMASDES mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

1. Merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
2. Mengoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan mangacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
3. Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengelolaan dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kedinasan yang meliputi; ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kerjasama, kehumasan, kearsipan, dokumentasi dan pengadaan barang/jasa;
5. Menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian;
6. Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan undang undang keterbukaan informasi publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik;
7. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka pengendalian internal kegiatan;
8. Menyusun konsep inovasi kesekretariatan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisis guna efektif pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
9. Mengoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang-bidang guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
10. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan

https://jdih.pemalangkab.go.id

kinerja;

11. Mengoordinasikan penyusunan laporan urusan pemerintahan bidang program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berdasarkan hasil laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B.1. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan subbagian Bina Program dan Keuangan
2. Menyusun usulan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta dokumen perencanaan lainnya.
3. Melaksanaan pengelolaan administrasi bina program dan keuangan.
4. Mengelola data urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
5. Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran.
6. Menyusun konsep dokumen pertanggungjawaban kinerja yang meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP), Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dokumen pertanggungjawaban lainnya.
7. Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta laporan keuangan lainnya
8. Menyiapkan bahan inovasi subbagian Bina Program dan Keuangan.
9. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan unsur SPIP.
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada subbagian Bina Program dan Keuangan.
11. Menyusun bahan laporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa.
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada subbagian Bina Program dan Keuangan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B.2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
2. Mengelola administrasi milik daerah meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pengamanan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, penatausahaan, pemanfaatan dan penyusunan laporan barang milik daerah.
3. Mengelola administrasi kehumasan meliputi keprotokolan dan informasi publik.
4. Menmgelola administrasi kehumasan meliputi keprotokolan dan informasi publik.
5. Mengelola administrasi administrasi kerumahtanggaan meliputi pengadaan penyediaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan jasa penunjang, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas.
6. Mengelola administrasi kepegawaian.
7. Mengelola ketatalaksanaan meliputi penyusunan sistem dan prosedur kerja.
8. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik.
9. Menyiapkan bahan inovasi Subbagian Umum dan Kepegawaian.
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Sunnagian Umum dan Kepegawaian.
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian.
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. Kepala Bidang Penataan Desa

Kepala Bidang Penataan Desa mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Penataan desa.
2. Menyusun rancangan kebijakan Bidang Penataan Desa.
3. Merumuskan kebijakan teknis di Bidang Penataan Desa.
4. Menyelenggarakan penataan desa yang meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa, fasilitasi

https://jdih.pemalangkab.go.id

tata wilayah desa, fasilitasi penataan kewenangan desa, fasilitasi penamaan dan kode desa, serta fasilitasi sarana dan prasarana desa.
5. Penyelenggaraan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa.
6. Menyusun konsep inovasi Bidang Pentaan Desa.
7. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Pentaan Desa.
8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Penataan Desa.
9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Penataan Desa.
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

D. Kepala Bidang Pemerintahan Desa

Kepala Bidang pemerintahan Desa mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Merencanakan program dan kegiatan Bidang pemerintahan Desa sesuai dengan dokumen perencanaan.
2. Menyusun rencangan kebijakan Bidang Pemerintahan Desa.
3. Merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pemerintahan Desa.
4. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, fasilitasi penyusunan produk hukum desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa, fasilitasi pengelolaan keuangan desa, pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa, evaluasi dan pengawasan peraturan desa, penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, fasilitasi manajemen pemerintahan desa, fasilitasi pengelolaan aset desa, pembeinaan peningkatan kapasitas anggota BPD, serta pelaksanaan penugasan urusan/kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh desa.
5. Menyusun konsep inovasi Bidang pemerintahan Desa.
6. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Pemerintahan Desa.
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Pemerintahan Desa.
8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan Desa.
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

E. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerja Sama Desa

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerja Sama Desa mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerja Sama Desa sesuai dengan dokumen perencanaan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2. Menyusun rancangan kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerja Sama Desa.
3. Merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerja Sama Desa.
4. Menyelenggarakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat Daerah serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah yang meliputi identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat, fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat, fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa, fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat, fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa, serta fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.
5. Menyelenggarakan fasilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam Daerah serta fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan.
6. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintah desa yang meliputi pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa, fasilitasi penyusunan profil desa, serta fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan.
7. Menyusun konsep inovasi pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerja Sama Desa.
8. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerja Sama Desa.
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerja Sama Desa.
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerja Sama Desa.
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sumber Daya pada DINPERMASDES Kabupaten Pemalang

Sumber daya DINPERMASDES Kabupaten Pemalang yang meliputi sumber daya manusia/kepegawaian dan sarana prasarana sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

https://jdih.pemalangkab.go.id

a. Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Jumlah pegawai di DINPERMASDES Kabupaten Pemalang dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa tersaji dalam tabel berikut Tabel 2.1

Tabel 2.1

Pegawai Dinpermasdes Kabupaten Pemalang

No.	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Golongan				Jumlah
				I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas	1					1	1
2	Sekretaris							0
3	Kepala Bidang	3				3		3
4	Kasubbag	1	1			1	1	2
5	JFT	3	1			4		4
6	JFU	9	5		7	7		14
7	PPPK	3	1		3	1		4
8	Non ASN	14	4	19				15
	Jumlah	31	12	19	7	15	2	43

Sumber : Data Dinpermasdes Kabupaten Pemalang

Pegawai DINPERMASDES Kabupaten Pemalang berjumlah 43 orang, meliputi 31 orang laki-laki dan 12 orang perempuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Dinpermasdes Kabupaten Pemalang dominan laki-laki yaitu sebanyak 72,09%. Agar Dinpermasdes Kabupaten Pemalang menerapkan responsif gender, untuk perekrutan tenaga non ASN selanjutnya disarankan berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya jumlah pegawai berdasar golongan, meliputi non ASN sebanyak 19 orang, golongan I sebanyak 0 orang, golongan II sebanyak 7 orang, golongan III sebanyak 15 orang dan golongan IV sebanyak 2 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Dinpermasdes Kabupaten Pemalang didominasi oleh Golongan III sebanyak 34,88%.

Tabel 2.2

Data Pegawai Berdasarkan Diklat Kepemimpinan

No.	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-Laki	Perempuan
1	Diklat PIM II	-	-	-
2	Diklat PIM III	-	-	-
3	Diklat PIM IV	-	-	-
4	ADUM	-	-	-
5	SEPADA	-	-	-
6	Struktural yang belum diklat	6	5	1
	Jumlah	6	5	1

Sumber : Data Dinpermasdes Kabupaten Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

Jumlah pegawai berdasarkan diklat kepemimpinan pada DINPERMASDES Kabupaten Pemalang, yaitu 2 orang sudah mengikuti Diklatpim III, 2 orang sudah mengikuti Diklatpim IV dan 2 orang belum mengikuti diklat kepemimpinan, hal ini disebabkan masih menunggu penyelenggaraan diklat dari instansi yang berwenang.

Tabel 2.3
Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-Laki	Perempuan
1	Pasca Sarjana (S2)	4	3	1
2	Sarjana (S1)	23	15	8
3	Diploma	7	6	1
4	SLTA	6	5	1
5	SLTP	2	2	0
6	SD	1	0	0
	Jumlah	43	31	12

Sumber : Data DINPERMASDES Kabupaten Pemalang

Jumlah pegawai DINPERMASDES Kabupaten Pemalang berdasar tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S2) sebanyak 4 orang, Sarjana (S1) sebanyak 23 orang, Diploma sebanyak 7 orang, SLTA sebanyak 6 orang, dan SLTP sebanyak 2 orang, SD 1 orang sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai di Dinpermasdes Kabupaten Pemalang dominan berpendidikan Sarjana (S1) yaitu sebanyak 53,49%.

Tabel 2.4
Data Pegawai Berdasar Tingkat Eselon

No.	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-Laki	Perempuan
1	IIB	1	1	0
2	IIIA	0	0	0
3	IIIB	3	3	0
4	IVA	2	1	1
Jumlah		6	5	1

Sumber : Data DINPERMASDES Kabupaten Pemalang

Jumlah pegawai DINPERMASDES Kabupaten Pemalang berdasarkan tingkat eselon, yaitu Eselon IIB sebanyak 1 orang, Eselon IIIA sebanyak 0 orang karena purna tugas, Eselon IIIB sebanyak 3 orang, dan Eselon IVA sebanyak 2 orang.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Untuk meningkatkan kapasitas SDM yang ada, DINPERMASDES Kabupaten Pemalang telah melaksanakan kegiatan pengembangan SDM yang tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Tahun	Jenis Pengembangan SDM	Jumlah Peserta	Anggaran Rp
1	2021	Peningkatan Kapasitas ASN dalam AdmPeraturan	37	4.185.000
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	37	4.185.000
2	2022	Peningkatan Kapasitas ASN dalam AdmPeraturan	40	3.000.000
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40	3.000.000
3	2023	Peningkatan Kapasitas ASN dalam AdmPeraturan	40	3.200.000
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40	3.200.000
4	2024	Peningkatan Kapasitas ASN dalam AdmPeraturan	43	6.000.000
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	43	6.000.000

b. Sarana Prasarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh DINPERMASDES Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.6

Inventarisasi Aset DINPERMASDES Kabupaten Pemalang

No.	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Jumlah Harga (Rp)
					Baik	Sedang	Rusak	
1	1.3		Aset Tetap					
		01	Tanah	2.205 (m2)	2.205 (m2)			806.400.000
			Jumlah KIB A	**2.205 (m2)**	**2.205 (m2)**			**806.400.000**
		02	Peralatan dan Mesin					
		02.01	Alat-alat besar	1			1	12.500.000
		02.02	Alat-alat Angkutan	27	22	2	3	1.925.927.387
		02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	3	3			10.150.000
		02.05	Alat Kantor & Rumah Tangga	590	513	21	66	1.114.019.150
		02.06	Alat Studi & Alat Komunikasi	37	30	2	5	207.662.140
		02.10	Komputer					1.099.396.803
			Jumlah KIB B	**658**	**559**	**25**	**74**	**4.369.655.480**
		03	Gedung dan Bangunan					
		03.01	Bangunan Gedung	904 m2	630	274		1.734.444.646
			Jumlah KIB C	**904 m2**	**630**	**274**		**1.734.444.646**
		04	Jalan, Irigasi dan Jaringan					
		04.04	Jaringan Distribusi Lain-lain	75 m'	54	21		52.189.000
			Jumlah KIB D	**75 m'**	**54**	**21**		**52.189.000**
2	1.5		**Aset Lainnya**					
		05.03	Aset Tidak Berwujud	1				30.000.000
			Jumlah KIB E	**1**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**
			Jumlah Total					**6.962.689.126**

Sumber : Data Dinpermasdes Kabupaten Pemalang

Sarana prasarana berupa peralatan dan mesin yang dimiliki DINPERMASDES Kabupaten Pemalang dalam menunjang kinerja organisasi masih cukup memadai. Berdasarkan tabel di atas jumlah peralatan dan mesin pada Dinpermasdes Kabupaten Pemalang sejumlah 658 unit dengan kondisi sebanyak 559 unit atau 84,95% masih dalam kondisi baik, 25 unit atau 3,8% dalam kondisi sedang peralatan dan selebihnya dalam kondisi rusak sejumlah 74 unit atau 11,25 %.

Sedangkan untuk Prasarana Gedung yang berjumlah 4 unit dengan total menempati ruang seluas 904 m^2, rata-rata masih dalam kondisi yang baik yaitu seluas 630 m2 atau

https://jdih.pemalangkab.go.id

70%, sedangkan sisanya sejumlah 30% atau seluas 274 m^2 kondisi bangunan dalam kondisi sedang (ada sedikit kerusakan pada lantai, plafond dan atap). Untuk kondisi jaringan drainase pada prasarana gedung rata-rata masih berfungsi dengan baik 72% atau sepanjang 54 m', sedangkan selebihnya ada tetap berfungsi meski terdapat kerusakan dinding pada saluran drainase sepanjang 21m'. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlu adanya pemeliharaan prasarana gedung dan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.

3. Kinerja Pelayanan DINPERMASDES Kabupaten Pemalang

Gambaran kinerja pelayanan DINPERMASDES Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 terkait dengan capaian indikator tujuan, sasaran dan program dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.7

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinpermasdes Kabupaten Pemalang Berdasarkan Bab II RPJMD tahun 2021 – 2026

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target NPSK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian				Rasio Capaian Pada Tahun			
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
A	Tujuan																		
	Jumlah Desa Berdaya	Desa				2	6	9	15	23	31		6	9	15	0	100	100	100
B	Sasaran																		
	Indeks kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks				77,58	78,04	78,64	61,14	61,00	61,10	78,37	78,28	79,02	61,73	101	100	100	101
	Nilai Sakip	Nilai				53,71	58,00	61,02	66,00	67,18	67,25	58,72	61,10	65,85	66,93	111	104	108	101
C	Program																		
I	PROGRAM PENURUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
	Indeks kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks				77,54	78,04	78,64	79,14	79,74	80,24	78,04	78,28	79,02	61,73	101	100	100	103
	Nilai Sakip	Nilai				53,71	58,00	61,02	66,00	67,18	67,25	53,50	61,10	65,85	66,93	99,61	104	108	101
II	PROGRAM PENATAAN DESA																		
	Persentase desa tertata	Persen				2,37	11,79	18,87	23,58	35,38	50,47	2,37	11,79	18,87	23,58	100	100	100	100
III	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA																		
	Persentase desa yang meningkat PADes nya dari hasil kerjasama desa	Persen				37,44	46,45	61,14	63,96	72,04	77,73	37,44	36,65	61,14	63,96	100	78,90	100	100
IV	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA																		
	Persentase Desa yang memiliki Administrasi Pemerintahan Desa Baik	Persen				4,47	11,79	18,87	23,58	35,38	50,47	4,47	11,79	18,87	23,58	100	100	100	100
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT																		
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) yang produktif	Persen				18,09	23,33	28,73	34,83	41,33	48,59	18,09	28,74	28,73	34,83	100	115	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dari tabel 2.3.1 diatas pencapaian kinerja DINPERMASDES Kabupaten Pemalang pada masa Renstra 2021-2026, dimana secara singkat dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Indikator Tujuan

Jumlah Desa Berdaya dengan target hingga akhir tahun 2026 sebesar 23 Desa, pada tahun 2024 tercapai 15 Desa, dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2024 sebesar 65,22%.

2) Indikator Sasaran

Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dan Nilai Sakip yang merupakan indicator dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai target akhir tahun 2026 sebesar 100% realisasi sampai dengan tahun 2024 tercapai 73,57%, dengan rasio capaian smpai dengan tahun 2024 sebesar 99,18%.

- Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh target akhir tahun 2026 sebesar 81,10, pada tahun 2024 telah tercapai realisasi sebesar 81,73 dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2024 telah tercapai 100%.
- Nilai Sakip dengan target akhir tahun 2026 sebesar 67,25, pada tahun 2024 telah tercapai realisasi 66,00, rasio capaian sampai tahun 2024 sebesar 98,24%.

3) Indikator Program

b. Persentase Desa Tertata mempunyai target sampai akhir tahun 2026 sebesar 50,47 realisasi sampai dengan tahun 2024 tercapai 23,58 dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2024 sebesar 46,72%.

c. Persentase desa yang meningkat PADes nya dari hasil kerjasama desa mempunyai target sampai akhir tahun 2026 sebesar 77,73, realisasi sampai dengan tahun 2024 tercapai 63,98, dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2024 sebesar 82,31%.

d. Persentase Desa Yang Memiliki Administrasi Pemerintahan Baik mempunyai target sampai akhir tahun 2026 sebesar 50,47, realisasi sampai dengan tahun 2024 tercapai 23,58, dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2024 sebesar 46,72%.

e. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) yang produktif mempunyai target sampai akhir tahun 2026 sebesar 48,59, realisasi sampai dengan tahun 2024 tercapai 34,83, dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2024 sebesar 71,68%.

Tabel 2.8
Rencana Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinpermasdes Kabupaten Pemalang Berdasarkan RPJMD Tahun 2025 – 2029

No.	Indikator	Satuan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Target NPSK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					
										2025	2026	2027	2028	2029	2030
A	Indeks Desa	Persen	Meningkatkan Kemandirian Desa							69.50	71.24	72.97	74.71	76.45	78.18
B	Persentase Desa Mandiri	Persen		Meningkatnya Capaian Desa Mandiri						24.64	25.59	26.07	26.45	27.01	27.66
C	Program														
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	Indeks kepuasan Masyarakat yang dipenleh	Angka								82.00	82.25	82.45	82.75	82.95	83.15
	Nilai Sakip	Angka								67.18	67.68	68.38	68.88	69.58	70.28
II	PROGRAM PENATAAN DESA														
	Indeks infrastruktur Desa	Persen			Meningkatnya kualitas penataan desa					5.47	5.61	5.75	5.88	6.02	6.16
	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Desanya	Desa			Meningkatnya Fasilitasi Penataan Desa					300	300	300	300	300	300
	Pembentukan, Penghapusan Jumlah Desa yang Melakukan Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa				Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan Jumlah Desa yang Melakukan Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				1	1	1	1	1	1
	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Desa				Terfasilitasinya Penataan Wilayah Desa				3	3	3	3	3	3
	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Desa				Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa				25	25	1	1	1	1
	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa				Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa				1	1	1	1	1	1
	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Unit				Terfasilitasinya Sarana Prasarana Desa				350	350	300	300	300	300
III	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA														
	Persentase desa yang melaksakan kerjasama	Persen			Meningkatnya kualitas kerjasama antar desa					17.51	17.95	18.39	18.82	19.26	19.70
	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa yang terfasilitasi	Dokumen				Terfasilitasinya Dokumen Kerja Sama Antar Desa				18	18	18	18	18	18

https://jdih.pemalangkab.go.id

	Jumlah dokumen Kerjasama Antar Desa dalam kabupaten/kota yang terfasilitasi	Dokumen				Terfasilitasi dokumen Kerjasama Antar Desa dalam kabupaten/kota yang terfasilitasi				14	14	14	14	14	14
	Jumlah dokumen kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota yang terfasilitasi	Dokumen				Terfasilitasinya dokumen kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota				2	2	3	2	2	2
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen				Terfasilitasinya Dokumen Pembangunan Kawasan Perdesaan				2	2	3	2	2	2
IV	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA														
	Persentase Desa yang memiliki Administrasi Pemerintahan Desa Baik	Persen			Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa					9.76	9.80	9.19	9.41	9.53	9.65
	Jumlah Desa yang terbina dokumen Administrasi Pemerintahan Desanya	Dokumen				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa				212	212	212	212	212	212
	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen				Terfasilitasinya Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				12	12	12	12	12	12
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen				Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Desa				2	2	2	3	3	3
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen				Terfasilitasinya Dokumen Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				1	1	1	1	1	1
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Orang				Terfasilitasinya Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa				7	7	1	1	1	1
	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Laporan				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				80	80	14	14	14	14
	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Dokumen				Terfasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa				1	1	1	1	1	1
	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dokumen				Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				4	4	1	1	1	1
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen				Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				1	1	1	1	1	1

https://jdih.pemalangkab.go.id

	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan				Terselenggaranya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				1	173	1	1	1	1
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan				Terfasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1	1	1	1	1	1
	Jumlah Dokumen Profil Desa yang sutun	Dokumen				Terfasilitasinya Dokumen Profil Desa yang tersusun				1	1	1	1	1	1
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa tersusun	Dokumen				Terfasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa tersusun				3	3	1	1	1	1
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen				Terfasilitasinya Pengelolaan Aset Desa				1	1	1	1	1	1
	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang				Terselenggaranya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				25	25	1	1	1	1
	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Desa				Terfasilitasi Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				11	11	1	1	1	1
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Laporan				Terfasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa				1	1	1	1	1	1
	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Dokumen				Terfasilitasinya Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota oleh Desa				1	1	1	1	1	1
	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen				Terfasilitasinya Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				2	2	2	1	1	1
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persen													
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) yang produktif	Persen			Meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan desa					6.56	6.72	6.89	7.05	7.22	7.22

https://jdih.pemalangkab.go.id

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terbina	Dokumen				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				41	41	41	41	41	41
Jumlah Dokumen Hasil Penelaan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen				Terfasilitasinya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				4	4	4	4	4	4
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga AdatDesa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Lembaga				Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				4	4	4	4	4	4
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit				Terfasilitasinya Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1	1	1	1	1	1
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen				Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1	1	1	1	1	1

https://jdih.pemalangkab.go.id

	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan				Terfasilitasinya Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1	1	1	1	1	1
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan hakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan				Terfasilitasinya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1	1	1	1	1	1
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen				Terfasilitasinya Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa				1	1	1	1	1	1
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen				Terfasilitasinya Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				28	28	28	29	28	28
D	Prosentase Pengentasan Desa Tertinggal								IKK	100	100	100	100	100	100
E	Prosentase Peningkatan Status Desa Mandiri								IKK	81,13	81,4	81,67	81,94	82,21	82,48

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dari tabel 2.3.2 diatas rencana pencapaian kinerja DINPERMASDES Kabupaten Pemalang untuk Renstra 2025-2029, dimana secara singkat dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Indikator Tujuan

   Tujuan yang akan dicapai adalah Meningkatkan Kemandirian Desa dengan Indikator "Indeks Desa" target akhir tahun 2029 sebesar 76,45% dimana diukur melalui nilai Indeks Desa yang merupakan indikator komposit dari 6 dimensi yaitu Dimensi Layanan Dasar (Kesehatan, Pendidikan, Utilitas Dasar), Dimensi Sosial (Aktifitas, Fasilitas Masyarakat), Dimensi Sosial (Produksi Desa, Fasilitas Pendukung Ekonomi), Dimensi Lingkungan (Pengelolaan Lingkungan, Penanggulangan Bencana), Dimensi Aksesibilitas (Kondisi Akses Jalan, Kemudahan Akses), Dimensi Tata Kelola Desa (Kelembagaan dan Pelayanan Desa, Tata Kelola Keuangan Desa, dimana nilai Indeks Desa maksimal adalah 100%.

2. Indikator Sasaran

   Sasaran Meningkatnya Capaian Desa Mandiri dengan indicator "Peresentase Desa Mandiri" dengan target akhir tahun 2029 sebesar 27,01%, yang diukur dengan formula perhitungannya adalah membandingkan jumlah desa yang berstatus mandiri berdasarkan Indeks Desa dengan jumlah seluruh desa.

3. Indikator Program

   A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

      a) Indikator Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinpermasdes dengan target akhir tahun 2029 sebesar 82,95%.

      b) Nilai Sakip mempunyai target akhir tahun 2029 sebesar 69,58.

   B. Program Penataan Desa dengan Indikator "Indeks Infrastruktur Desa" satuannya adalah persen, mempunyai target sampai akhir tahun 2029 sebesar 6,02%. Indeks Infrastruktur Desa dihitung dengan rumus jumlah comulatif indeks desa pada Dimensi Aksesibilitas, dimana nilai maksimal Dimensi Aksesibilitas adalah 7,87%.

   C. Program Kerjasama Desa dengan indicator Persentase desa yang melaksakan kerjasama sampai akhir tahun 2029 dengan target sebesar 19,26. Persentase desa yang melaksakan kerjasama dihitung dengan jumlah comulatif Indeks Desa pada Dimensi Ekonomi indikator Kerjasama Desa, dimana nilai maksimal 25,20%.

   D. Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan Indikator Indeks Tata Kelola Desa mempunyai target sampai akhir tahun 2029

https://jdih.pemalangkab.go.id

sebesar 9,63%, Indeks Tata Kelola Desa dihitung dengan rumus jumlah comulatif Indeks Desa pada Dimensi tata Kelola Desa dengan nilai maksimal 12,60%.

E. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan Indikator Persentase Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) mempunyai target sampai akhir tahun 2029 sebesar 7,22%, Indikator Persentase Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dihitung dengan rumus jumlah comulatif Indeks Desa pada Jumlah comulatif Indeks Desa pada skor indikator Posyandu+skor indikator Gotong Royong+skor indikator Lembaga Ekonomi dengan nilai maksimal 9,44%.

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DINPERMASDES Kabupaten Pemalang Berdasarkan Bab II RPJMD tahun 2021 – 2026

No.	Program	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun						Realisasi Tahun				Rasio Realisasi dan Anggaran Sampai dengan Tahun				Rata2 Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.934.041	6.403.559	5.327.755	5.555.530	9.261.670	9.717.586	5.858.592	6.004.610	5.032.185	4.955.977	98,73	93,77	94,45	89,21	0,04	- 0,02
II	PROGRAM PENATAAN DESA	297.930	514.754	338.127	1.600.784	917.300	957.300	297.195	598.324	335.226	1.599.567	99,75	86,75	99,14	99,92	3,73	3,77
III	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	152.809	234.190	175.232	97.497	670.229	711.081	152.725	183.463	174.104	89.086	99,88	78,34	99,36	91,37	- 0,44	- 0,49
IV	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.048.194	4.287.372	3.421.151	3.376.157	4.845.778	5.903.405	3.039.499	4.178.072	3.397.016	3.324.361	99,68	97,81	99,29	98,47	- 0,01	- 0,02
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	687.339	808.311	1.063.386	1.146.308	1.848.462	1.776.119	687.336	808.271	1.062.705	1.086.278	100	100	99,94	94,76	0,08	0,02

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 2025

Dari tabel 2.3.2 diatas pencapaian anggaran DINPERMASDES Kabupaten Pemalang pada masa Renstra 2021-2026, dimana secara singkat dapat dijabarkan sebagai berikut :

a) Progran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota realisasi sampai dengan tahun 2024 tercapai 89,21%, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 0,04 dan pertumbuhan realisasi sebesar – 0,02.
b) Progran Penataan Desa realisasi sampai dengan tahun 2024 tercapai 99,92%, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 3,73 dan pertumbuhan realisasi sebesar 3,77.
c) Progran Kerjasama Desa realisasi sampai dengan tahun 2024 tercapai 91,37%, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar - 0,44 dan pertumbuhan realisasi sebesar – 0,49.
d) Progran Pemerintahan Desa realisasi sampai dengan tahun 2024 tercapai 98,47%, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar - 0,01 dan pertumbuhan realisasi sebesar – 0,02.
e) Progran Lembaga Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat realisasi sampai dengan tahun 2024 tercapai 94,76%, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 0,08 dan pertumbuhan realisasi sebesar 0,02.

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

f) Berdasarkan evaluasi rasio antara anggaran dan realisasi pendanaan pada 5 program pelayanan Dinpermasdes Kabupaten Pemalang selama 2021-2026 secara keseluruhan dikategorikan baik yaitu sebesar 95,65%.

g) Dari rata rata rasio secara keseluruhan tersebut, masih terdapat 1 program yang masih dalam kategori kurang baik (<85%) yaitu pada program Peningkatan Kerja Sama Desa tahun 2022, dengan rasio 76,34%, hal ini disebabkan karena pihak penyedia tidak dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Kawasan Pertanian di Kecamatan Taman dan Petarukan.

4. Kelompok Sasaran Layanan DINPERMASDES Kabupaten Pemalang

Kelompok sasaran utama DINPERMASDES adalah masyarakat desa secara keseluruhan, termasuk individu, komunitas, lembaga masyarakat desa, dan pemerintah desa itu sendiri. DINPERMASDES melaksanakan tugas untuk meningkatkan potensi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, serta memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui pendekatan pembinaan dan pemberdayaan. Secara lebih rinci, kelompok sasaran tersebut meliputi :

1. Masyarakat Desa
   - Individu: Warga desa yang perlu diberdayakan secara pribadi, misalnya melalui pelatihan keterampilan atau peningkatan literasi keuangan.
   - Komunitas: Kelompok masyarakat secara kolektif, seperti kelompok tani atau koperasi, yang perlu difasilitasi untuk menjadi lebih kuat dan mandiri.
2. Lembaga Masyarakat Desa
   Berbagai organisasi masyarakat yang ada di desa, seperti karang taruna, PKK, atau BPD, yang dibina untuk memperkuat perannya dalam pembangunan desa.
3. Pemerintahan Desa:
   Aparatur dan perangkat desa yang perlu dibina dalam aspek administrasi dan tata kelola pemerintahan agar lebih baik dan partisipatif.

https://jdih.pemalangkab.go.id

5. Mitra DINPERMASDES Kabupaten Pemalang

Dalam melaksanakan tugasnya DINPERMASDES Kabupaten Pemalang bermitra dengan lembaga dan organisasi yang berkolaborasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintahan desa. Beberapa mitra utama DINPERMASDES antara lain adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Adat Desa (LAD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Karang Taruna, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK). Selain itu, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), badan usaha seperti BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) dan BUMDes MA (Badan Usaha Milik Bersama) dalam melaksanakan program.

Mitra-mitra DPMD memiliki peran penting dalam:

- Menggerakkan Partisipasi Masyarakat : Mengajak dan memotivasi masyarakat untuk aktif dalam pembangunan desa.
- Mengidentifikasi Masalah dan Kebutuhan : Membantu masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan sumber daya yang ada.
- Melaksanakan Program Pemberdayaan : Mendukung pelaksanaan program di bidang keterampilan, wirausaha, kesehatan, dan ketahanan pangan.
- Mengembangkan Potensi Desa : Membantu menggali dan mengembangkan potensi serta sumber daya alam di desa.
- Meningkatkan Pelayanan Masyarakat : Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis DINPERMASDES Kabupaten Pemalang

1. Permasalahan Pelayanan DINPERMASDES Kabupaten Pemalang

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. DINPERMASDES Kabupaten Pemalang merupakan Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan

https://jdih.pemalangkab.go.id

bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Pemetaan permasalahan pelayanan DINPERMASDES Kabupaten Pemalang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.10
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinpermasdes Kabupaten Pemalang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya penataan desa	Masih rendahnya kapasitas SDM aparatur desa dalam menata wilayah dan masih kurangnya peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa	Desa belum mempunyai renca tata ruang wilayah
			Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan desa
			Belum tersedianya sarana dan prasarana desa yang memadai
2	Belum optimalnya kerjasama antar desa	Masih rendahnya kemampuan desa dalam mengidentifikasikan potensi yang dimiliki untuk dikerjasamakan	Belum optimalnya Kerjasama Antar Desa
			Belum optimalnya kerjasama antar desa dengan pihak ketiga
			Belum optimalnya kerjasama dalam kawasan perdesaan
3	Belum optimalnya pelaksanaan administrasi pemerintahan desa	Masih rendahnya kapasitas SDM aparatur desa dalam mengelola administrasi pemerintahan desa	Masih ada desa yang belum tertib dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
			Masih rendahnya kemampuan desa dalam menyusun Raperdes dan Raperkades
			Masih ada desa yang penyusunan perencanaan pembangunan desanya belum sesuai ketentuan
			Masih ada aparatur desa yang belum memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa
			Belum optimalnya fasilitasi musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa
			Belum optimalnya evaluasi dan pengawasan peraturan desa
			Belum optimalnya fasilitasi penyusunan profil desa/kelurahan
			Adanya desa yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa
			Adanya desa yang melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
			Masih ada desa yang belum mampu melaksanakan manajemen pemerintahan desa yang efektif dan efisien
			Masih ada anggota BPD yang belum memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes
			Belum ada desa yang mempunyai batas desa
			Masih rendahnya kemampuan desa dalam menyusun laporan kepala desa

https://jdih.pemalangkab.go.id

			Masih rendahnya perkembangan desa/kelurahan
			Masih rendahnya kemampuan administrasi BUMDes/ma dan lembaga kerjasama antar desa
			Adanya penugasan urusan/kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh desa
			Masih rendahnya kemampuan desa dalam mengelola keuangan desa
			Masih rendahnya kemampuan desa dalam mengelola aset desa
4	Belum optimalnya Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ada	Masih rendahnya peran serta LKD dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa	Belum tertatanya lembaga kemasyarakatan yang ada
			Masih kurangnya kapasitas pengelola lembaga kemasyarakatan
			Masih terbatasnya sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan yang tersedia
			Mulai berkurangnya budaya gotong royong
			Belum optimalnya peran Satlinmas desa di masyarakat
			Belum optimalnya partisipasi masyarakat dan keluarga dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat
			Masih rendahnya pemanfaatan TTG
			Belum optimalnya lembaga ekonomi desa
5	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja	Belum tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan PD
			Belum optimalnya penyusunan dokumen penganggaran PD
			Belum optimalnya penyusunan laporan evaluasi kinerja PD
		Belum optimalnya pengadministrasian keuangan	Perlunya penyediaan gaji dan tunjangan ASN setiap bulan
			Perlunya verifikasi keuangan
			Masih terdapat temuan pemeriksaan
			Belum optimalnya penyusunan laporan keuangan PD
6	Belum optimalnya pelaksanaan kinerja pelayanan dan akuntabilitas Dinpermasdes	Belum optimalnya pengadministrasian Barang Milik Daerah (BMD)	Belum optimalnya penyusunan perencanaan BMD
			Belum optimalnya penatausahaan BMD
			Belum optimalnya penyusunan laporan BMD
		Masih rendahnya kapasitas SDM	Minimnya kegiatan peningkatan kapasitas
		Belum optimalnya penyediaan layanan administrasi umum	Terdapat komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang perlu diganti

https://jdih.pemalangkab.go.id

			Belum tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan
			Belum tercukupinya peralatan rumah tangga yang diperlukan
			Belum tercukupinya bahan logistik kantor
			Terdapat barang yang harus dicetak dan digandakan Minimnya bahan bacaan yang tersedia
			Terdapat materi yang harus dikoordinasi dan konsultasikan Belum optimalnya penataan arsip dinamis
			Belum optimalnya pelaksanaan SPBE
		Belum tercukupinya BMD sesuai kebutuhan	Belum tercukupinya kebutuhan kendaraan dinas
			Belum tercukupinya kebutuhan mebel
			Belum tercukupinya kebutuhan peralatan dan mesin lainnya
		Belum optimalnya penyediaan jasa	Masih terjadi surat yang tidak terkirim atau terlambat
		penunjang untuk memperlancar pelaksanaan tugas	Terdapat kebutuhan listrik, PDAM yang harus dibayar
			Terdapat peralatan dan perlengkapan kantor yang harus dijaga
			Jumlah ASN belum mencukupi kebutuhan
		Belum optimalnya pemeliharaan BMD	Terdapat kendaraan dinas yang harus dipelihara
			Terdapat mebel yang harus dipelihara
			Terdapat peralatan dan mesin yang harus dipelihara
			Terdapat gedung kantor yang harus dipelihara
			Terdapat sarpras gedung kantor yang harus dipelihara
			Terdapat sarpras pendukung gedung kantor yang harus dipelihara

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 2025

2. Isu Strategis DINPERMASDES Kabupaten Pemalang

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang.

Tabel 2.11

PERUMUSAN ISU STRATEGIS

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Adanya dana untuk pembangunan sarpras desa dan adanya regulasi yang mengatur tentang kewenangan desa, penataan wilayah serta pengelolaan pembangunan sarana prasarana di desa	Masih rendahnya kapasitas SDM aparatur desa dalam menata wilayah dan masih kurangnya peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa	Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan pada saat Penyusunan KLHS yang partisipatif melibatkan masyarakat dalam identifikasi isu-isu strategis, perumusan solusi, dan pengambilan keputusan terkait pembangunan.		Pembangunan dari Desa untuk Pemerataan Ekonomi dengan menekankan pembangunan yang dimulai dari desa dengan tujuan pemerataan ekonomi dan percepatan pengentasan kemiskinan. Program ini melibatkan peningkatan akses infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan di daerah pedesaan	Pemberdayaan Masyarakat Terpencil dengan Program-program yang bertujuan untuk memberikan akses layanan kesehatan dan pendidikan, serta membantu masyarakat yang kurang mampu, menjadi fokus penting.	Perlu ditingkatkannya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa
Adanya Badan Kerjasama Desa (BKD) dan adanya regulasi yang mengatur tentang kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan	Masih rendahnya kemampuan desa dalam mengidentifikasikan potensi yang dimiliki untuk dikerjasamakan			kemandirian ekonomi masyarakat melalui koperasi merah putih	Inisiatif Pemerintah baik pusat maupun daerah, terus berupaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui program-program seperti bantuan sosial, program padat karya, dan program pemberdayaan masyarakat desa.	
Adanya sistem informasi desa (SID) yang mampu mengefisiensikan administrasi pemerintahan desa	Masih rendahnya kapasitas SDM aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan desa					
Secara kelembagaan ada LKD sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa	Masih rendahnya peran serta LKD dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa				Tantangan yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi, dan perubahan nilai dan adat istiadat.	
Adanya pendampingan dari PD terkait (Bagian Organisasi, Inspektorat dan Bappeda);	Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran					Perlu ditingkatkannya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Dinpermasdes Kabupaten Pemalang
	Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan					

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

Mengacu pada isu-isu strategis yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pemalang, maka dapat diidentifikasi isu strategis yang harus diselesaikan DINPERMASDES Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

1. Perlu ditingkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa adalah tantangan dan peluang penting yang perlu menjadi perhatian untuk mencapai pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang lebih baik, antara lain :
   - Infrastruktur dan Prasarana :
     Kurangnya sarana dan prasarana dasar seperti kantor desa yang memadai, serta infrastruktur pelayanan publik yang belum optimal.
   - Sumber Daya Manusia :
     Kualitas sumber daya manusia (aparatur dan masyarakat) yang masih rendah, serta pembinaan administrasi yang belum rapi.
   - Tata Kelola Keuangan :
     Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, yang dapat menyebabkan potensi korupsi.
   - Aset Desa :
     Pengelolaan aset desa yang kurang maksimal dan belum terinventarisasi dengan baik.
   - Tata Ruang :
     Belum tersusunnya tata ruang desa yang jelas, yang menjadi dasar perencanaan pembangunan.
   - Partisipasi Masyarakat :
     Kehadiran dan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa belum maksimal, sehingga program pembangunan belum sepenuhnya sesuai kebutuhan masyarakat.
   - Kolaborasi multi pihak
     Masih belum optimalnya kolaborasi multi pihak dalam pelaksanaan pemberdayaan dan kemandirian desa.
2. Perlu ditingkatkannya kinerja pelayanan dan akuntabilitas DINPERMASDES Kabupaten Pemalang adalah karena rendahnya kualitas dan efektivitas pelayanan publik dan belum optimalnya implementasi akuntabilitas kinerja.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRETEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

DINPERMASDES Kabupaten Pemalang dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan mampu bersaing di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, maka DINPERMASDES Kabupaten Pemalang harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan komprehensif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, DINPERMASDES Kabupaten Pemalang secara proaktif berperan dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan melalui peningkatan kemandirian desa.

3.1 Tujuan Renstra DINPERMASDES Kabupaten Pemalang

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis untuk menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang yang mengarahkan pada perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan. Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra;
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi;
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Renstra.

https://jdih.pemalangkab.go.id

DINPERMASDES Kabupaten Pemalang dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan mampu bersaing di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, maka DINPERMASDES Kabupaten Pemalang harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan komprehensif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja. Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, DINPERMASDES Kabupaten Pemalang secara proaktif berperan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan.

Tujuan Renstra DINPERMASDES Kabupaten Pemalang harus berdasar pada sasaran Daerah yang termuat dalam RPJMD. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah : **"PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA"**. Visi ini memiliki pembentuk kata :

1. **Bersih** : Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan.
2. **Cakap** : dimaknai memiliki sumber daya manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
3. **Handal** : dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur

https://jdih.pemalangkab.go.id

masyarakatnya.

4. **Mulya** : Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. Resik: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih.
   Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik.

2. Hijau: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sector unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau, yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan) yang ramah lingkungan, industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM dimasyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.

3. Apik: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penaatan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dari Desa.

https://jdih.pemalangkab.go.id

4. Peduli: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi.
5. Silaturahmi: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, dan saling menghormati dan teposliro.
6. Organisatoris: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan *Good Governance, Clean Governance* dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.
7. Digitalisasi : memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi.
8. Ikhlas: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkan kearifan dan budaya lokal.

Adapun keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Pemalang 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Frase Bersih dan Handal** dalam Visi akan dicapai dengan **Misi 1 Resik**: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih; **Misi 6**

https://jdih.pemalangkab.go.id

Organisatoris: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi dan **Misi 7 Digitalisasi**: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar.

2. **Frase Cakap** dalam Visi akan dicapai dengan **Misi 2 Hijau**: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan; **Misi 3 Apik**: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah dan **Misi 4 Peduli**: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat.
3. **Frase MULYA** dalam Visi akan dicapai dengan **Misi 5 Silaturahmi**: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera dan **Misi 8 Ikhlas**: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan.

RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 menjadi pedoman kerja bagi seluruh PD, DPRD dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan. RPJMD juga digunakan untuk memantau kinerja dan perkembangan pembangunan daerah. RPJMD ini akan menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra-PD). Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMD ini akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, DINPERMASDES mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Pemalang dalam kurun waktu lima tahun kedepan maka sesuai dengan tugas dan fungsinya DINPERMASDES Kabupaten Pemalang mendukung **Frasa Cakap**, dengan tujuan yang akan dicapai adalah **"Meningkatkan kemandirian desa"**. Pemerintah Kabupaten Pemalang mulai tahun 2025 telah menetapkan Indikator Indeks Desa (ID) sesuai dengan Permendes Nomor 9 Tahun 2024 sebagai indikator untuk

https://jdih.pemalangkab.go.id

mengukur capaian pembangunan/kemandirian desa, dengan indikator komposit terdiri dari 6 dimensi yaitu Dimensi Layanan Dasar (Kesehatan, Pendidikan, Utilitas Dasar), Dimensi Sosial (Aktifitas, Fasilitas Masyarakat), Dimensi Ekonomi (Produksi Desa, Fasilitas Pendukung Ekonomi), Dimensi Lingkungan (Pengelolaan Lingkungan, Penanggulangan Bencana), Dimensi Aksesibilitas (Kondisi Akses Jalan, Kemudahan Akses), Dimensi Tata Kelola Desa (Kelembagaan dan Pelayanan Desa, Tata Kelola Keuangan Desa).

3.2 Sasaran Renstra DINPERMASDES Kabupaten Pemalang

DINPERMASDES Kabupaten Pemalang dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa mempunyai sasaran jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2025 – 2029, yaitu :

1. **"Meningkatnya Capaian Desa Mandiri"** yang diukur dengan indikator Persentase Desa Mandiri yang formula perhitungannya adalah membandingkan jumlah desa yang berstatus mandiri berdasarkan Indeks Desa dengan jumlah seluruh desa.
2. **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah"** yang diukur dengan :
   - Indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja DINPERMASDES** yang diperoleh dari hasil survei kepuasan kepada masyarakat dan pemerintahan desa
   - Indikator **Nilai SAKIP** merupakan hasil evaluasi penilaian atas akuntabilitas Kinerja DINPERMASDES oleh Inspektorat .

3.3 Strategis DINPERMASDES Kabupaten Pemalang Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh DINPERMASDES Kabupaten Pemalang guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program-program yang bersifat indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dan merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan yang telah ditetapkan yang dijabarkan dalam kebijakan dan program. Strategi diperlukan dalam memanajemen setiap program, kegiatan dan sub

https://jdih.pemalangkab.go.id

kegiatan sebagai sebuah kesatuan cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang dimiliki.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran, strategi dijabarkan dalam arah kebijakan dalam pencapaian pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, yang dikembangkan dengan prinsip untuk dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang, memenuhi kebutuhan layanan yang berbeda tiap *segment* pengguna layanan dan pemangku kepentingan, bernilai tambah dan berkelanjutan, dengan tahapan penentuannya yang meliputi :

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan dan isu-isu strategis;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi;
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*);
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran. Strategi dan kebijakan DINPERMASDES Kabupaten Pemalang 2025-2029 dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut:

Strategi DINPERMASDES Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, meliputi:

Sasaran 1 : Meningkatnya Capaian Desa Mandiri

Pencapaian sasaran ini diarahkan melalui strategi :

a. Peningkatan kapasitas kepada aparat pemerintah desa, lembaga ekonomi desa dan masyarakat desa melalui pelatihan dan pendidikan guna meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam berbagai bidang.
b. Pengembangan ekonomi desa dengan mendukung pengembangan usaha ekonomi desa.
c. Penguatan kelembagaan desa, membantu desa dalam membangun dan memperkuat lembaga-lembaga desa dan juga mendukung pencapaian koperasi merah putih dan kecamatan berdaya

https://jdih.pemalangkab.go.id

d. Peningkatan akses informasi dan teknologi melalui fasilitasi akses masyarakat desa terhadap informasi dan teknologi, termasuk internet dan media sosial, untuk mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
e. Pembangunan infrastruktur desa melalui fasilitasi pembangunan infrastruktur desa yang memadai.
f. Partisipasi masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan desa.
g. Pengembangan potensi lokal dengan mendorong pemanfaatan potensi alam dan sumber daya lokal yang dimiliki desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
h. Keterlibatan perempuan dan anak dengan memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan perempuan dan anak-anak dalam proses pembangunan desa.
i. Pengelolaan sumber daya alam, mengelola sumber daya alam desa secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat desa, termasuk menjaga kelestarian lingkungan.
j. Inovasi teknologi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai program pembangunan desa
k. Pengembangan Kerjasama Desa dan optimalisasi pembangunan Kawasan Perdesaan

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran ini diarahkan melalui strategi :

b. memperbaiki pelayanan yang diberikan dengan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi atas hasil survei kepuasan masyarakat.
c. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Adapun tujuan dan sasaran DINPERMASDES Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinpermasdes Kabupaten Pemalang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan daya saing pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Meningkatkan Kemandirian Desa		Indeks Desa	69.50	71.24	72.97	74.71	76.45	78,18	
		Meningkatnya Capaian Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri	24,64	25.59	26.07	26.45	27.01	27.96	
		Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,00	82,25	82,45	82,75	82,95	83,15	
			Nilai SAKIP	67,18	67,68	68,38	69,88	69,58	70,28	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

Selanjutnya pentahapan Renstra DINPERMASDES Kabupaten Pemalang selama kurun waktu tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tahun 2026 Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia. Prioritas pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan, jalan mantap dan koneksi antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka mempercepat distribusi barang dan jasa.
2. Mendorong BUMDes dan BUMDesMa dalam penguatan kemandirian pangan.
3. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui PKK dan RT RW untuk memilah sampah dari rumah dan pengelolaan kontrol landfiil TPA. Peningkatan pilah sampah pada semua sektor baik publik maupun swasta, penguatan bank sampah.
4. Meningkatnya pembangunan desa dengan terpenuhinya Sarana dan prasarana Desa sesuai dokumen perencanaan Desa sebagai upaya pemerataan pembangunan dalam menata desa melalui Fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa
5. Sinergitas Pemerintah Kabupaten dengan TNI dan Forkopimda dalam memfasilitasi Pembangunan sarana dan prasarana Desa melalui Fasilitasi Pelaksanaan TMMD
6. Evaluasi dan pengembangan kawasan perdesaan untuk peningkatan produk unggulan kawasan
7. Terwujudnya dokumen dan pemasangan patok batas desa yang jelas sesuai ketentuan dalam Fasilitasi Batas Desa
8. Pembinaan dan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa
9. Fasilitasi pembayaran premi BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
10. Fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa.
11. meningkatnya akuntabilitas, efektifitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa
12. Pelaksanaan Rapat koordinasi kepala desa dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Bupati Pemalang guna sinergitas pembangunan daerah dan desa serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Pemalang.
13. fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa

https://jdih.pemalangkab.go.id

sesuai dengan peraturan perundang-undangan

14. fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan
15. meningkatnya akuntabilitas, efektifitas dan transparansi pengelolaan aset desa
16. meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa melalui fasilitasi penyusunan RKP Desa agar selaras antara arah kebijakan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan daerah.
17. meningkatnya peran dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa melalui peningkatan kapasitas
18. fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa melalui penetapan Peraturan Bupati mengenai batas desa
19. fasilitasi penyusunan laporan kepala desa yang berisi gambaran umum tentang kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Bupati, BPD, dan/atau masyarakat desa
20. peningkatan kualitas perangkat desa melalui pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat
21. Pendampingan BUMDesa menjadi kategori Maju (1 BUM Desa)
22. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang mampu menciptakan Good and Clean Government, peningkatan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi dan berbasis teknologi, peningkatan profesionalisme ASN, peningkatan budaya kerja.

Tahun 2027 Mengembangkan potensi perekonomian melalui pembangunan pariwisata terintegrasi, industri bidang pertanian dan perikanan serta pengembangan UMKM. Prioritas tahun 2027 adalah :

1. Pengembangan infrastruktur dalam pengembangan potensi perekonomian daerah. Penguatan daya saing SDM dalam mendorong daya saing ekonomi. Penguatan industri hijau dan ekonomi sirkuler. Prioritas pengelolaan sampah dan limbah industri.
2. Meningkatnya pembangunan desa dengan terpenuhinya Sarana dan prasarana Desa sesuai dokumen perencanaan Desa sebagai upaya pemerataan pembangunan dalam menata desa melalui Fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa
3. Sinergitas Pemerintah Kabupaten dengan TNI dan Forkopimda dalam memfasilitasi Pembangunan sarana dan prasarana Desa melalui

https://jdih.pemalangkab.go.id

Fasilitasi Pelaksanaan TMMD

4. Pelaksanaan pembangunan sarana dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangan Desa dalam Fasilitasi Kewenangan Desa
5. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui PKK dan RT RW untuk memilah dan mengolah sampah dari rumah. Peningkatan pilah dan olah sampah pada semua sektor baik publik maupun swasta, penguatan bank sampah.
6. Terwujudnya dokumen dan pemasangan patok batas desa yang jelas sesuai ketentuan dalam Fasilitasi Batas Desa
7. Pembinaan dan Pengembangan kawasan perdesaan yang mampu mendorong pengembangan produk unggulan kawasan serta penyusunan dokumen RPKP 1 (satu) kawasan
8. pembinaan dan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa
9. Fasilitasi pembayaran premi BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
10. fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa.
11. meningkatnya akuntabilitas, efektifitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa
12. Pelaksanaan Rapat koordinasi kepala desa dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Bupati Pemalang guna sinergitas pembangunan daerah dan desa serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Pemalang.
13. fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan
14. fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan
15. meningkatnya akuntabilitas, efektifitas dan transparansi pengelolaan aset desa
16. meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa melalui fasilitasi penyusunan RKP Desa agar selaras antara arah kebijakan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan daerah.
17. meningkatnya peran dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa melalui peningkatan kapasitas
18. fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa melalui penetapan Peraturan Bupati mengenai batas desa
19. fasilitasi penyusunan laporan kepala desa yang berisi gambaran umum tentang kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Bupati, BPD, dan/atau masyarakat desa

https://jdih.pemalangkab.go.id

20. peningkatan kualitas perangkat desa melalui pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat
21. Pembinaan BUM Desa unit usaha wisata
22. Pendampingan BUMDesa dan BUMDesMa dalam pengelolaan ketahanan pangan
23. Pendampingan BUMDesa menjadi kategori Maju (1 BUMDesa)
24. Pemberdayaan masyarakat melalui PKK dan RT RW untuk memilah dan mengolah sampah dari rumah
25. Pembinaan, monitoring dan evaluasi Koperasi Desa Merah Putih
26. Pembinaan, monitoring dan evaluasi Kecamatan Berdaya

Tahun 2028 Mempercepat pembangunan perkotaan dan perdesaan guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi dan modernisasi. Prioritas pada tahun 2028 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pembangunan perdesaan, penataan wilayah perdesaan, membangun area publik yang mendorong aktivitas masyarakat dan ekonomi masyarakat desa.
2. Memperkuat hilirisasi dan modernisasi. Meningkatkan pembangunan desa sebagai upaya pemerataan pembangunan. Penguatan digitalisasi pelayanan publik, mendorong Smart Village dalam menata desa.
3. Pengembangan kawasan perdesaan yang mampu mendorong pengembangan sektor unggulan. Penguatan tata kelola yang mampu mewujudkan penataan perkotaan dan perdesaan.
4. Penguatan BUMDes dan BUMDesMa dalam pengembangan perekonomian desa.
5. Peningkatan kapasitas lembaga ekonomi desa dalam mendorong pembangunan desa.
6. Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam penemuan energi terbarukan berdasarkan potensi desa (hydro, surya, panas bumi dan angin) dengan melakukan kolaborasi bersama Perguruan Tinggi.
7. Meningkatkan daya saing SDM kota dan desa dalam mempercepat pembangunan perkotaan dan perdesaan.
8. Meningkatnya pembangunan desa dengan terpenuhinya Sarana dan prasarana Desa sesuai dokumen perencanaan Desa sebagai upaya pemerataan pembangunan dalam menata desa melalui Fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa
9. Sinergitas Pemerintah Kabupaten dengan TNI dan Forkopimda dalam

https://jdih.pemalangkab.go.id

memfasilitasi Pembangunan sarana dan prasarana Desa melalui Fasilitasi Pelaksanaan TMMD

10. Pelaksanaan pembangunan sarana dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangan Desa dalam Fasilitasi Kewenangan Desa
11. Fasiltasi dokumen dan pemasangan patok batas desa yang jelas sesuai ketentuan dalam Fasilitasi Batas Desa
12. Penyusunan dokumen RPKP 1 (satu) kawasan perdesaan untuk meningkatkan produk unggulan kawasan
13. Monitoring, Evaluasi dan Review kawasan perdesaan (3 kawasan)
14. pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa
15. Fasilitasi pembayaran premi BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
16. fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa.
17. meningkatnya akuntabilitas, efektifitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa
18. Pelaksanaan Rapat koordinasi kepala desa dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Bupati Pemalang guna sinergitas pembangunan daerah dan desa serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Pemalang.
19. fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan
20. fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan
21. meningkatnya akuntabilitas, efektifitas dan transparansi pengelolaan aset desa
22. meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa melalui fasilitasi penyusunan RKP Desa agar selaras antara arah kebijakan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan daerah.
23. meningkatnya peran dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa melalui peningkatan kapasitas
24. fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa melalui penetapan Peraturan Bupati mengenai batas desa
25. fasilitasi penyusunan laporan kepala desa yang berisi gambaran umum tentang kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Bupati, BPD, dan/atau masyarakat desa
26. peningkatan kualitas perangkat desa melalui pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih efektif dan efisien

https://jdih.pemalangkab.go.id

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat

27. Pembinaan BUMDesa kategori dasar
28. Pendampingan BUMDesa dan BUMDesma dalam pengelolaan ketahanan pangan
29. Pendampingan BUMDesa menjadi kategori Maju (1 BUMDesa)
30. Pemberdayaan masyarakat melalui PKK dan RT RW untuk memilah sampah dari rumah

Tahun 2029 Mewujudkan daya saing daerah menuju Pemalang Bersih, Cakap, Handal dan Mulya (BERCAHAYA). Prioritas pada tahun 2029 adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan hilirisasi dan modernisasi produk unggulan desa menuju produk potensi ekspor dengan tersedianya daya tamping air, energi yang cukup.
2. Semakin meluas jalan mantap, sumberdaya alam yang mampu mendorong ketahanan air dan pangan, semakin meluas kepemilikan rumah layak huni dan berkurangnya Kawasan Kumuh.
3. Mewujudkan good and clean government, pemantapan maturisasi SPIP, digitalisasi pelayanan publik.
4. Pemantapan Pemalang Resik yaitu lingkungan yang bersih dengan sampah yang telah terolah.
5. Meningkatnya pembangunan desa dengan terpenuhinya Sarana dan prasarana Desa sesuai dokumen perencanaan Desa sebagai upaya pemerataan pembangunan dalam menata desa melalui Fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa
6. Sinergitas Pemerintah Kabupaten dengan TNI dan Forkopimda dalam memfasilitasi Pembangunan sarana dan prasarana Desa melalui Fasilitasi Pelaksanaan TMMD
7. Pelaksanaan pembangunan sarana dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangan Desa dalam Fasilitasi Kewenangan Desa
8. Terwujudnya dokumen dan pemasangan patok batas desa yang jelas sesuai ketentuan dalam Fasilitasi Batas Desa
9. Pembinaan dan Pengembangan kawasan perdesaan yang mampu mendorong pengembangan produk unggulan kawasan
10. pembinaan dan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa
11. Fasilitasi pembayaran premi BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
12. fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa.

https://jdih.pemalangkab.go.id

13. meningkatnya akuntabilitas, efektifitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa
14. Pelaksanaan Rapat koordinasi kepala desa dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Bupati Pemalang guna sinergitas pembangunan daerah dan desa serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Pemalang.
15. fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan
16. fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan
17. meningkatnya akuntabilitas, efektifitas dan transparansi pengelolaan aset desa
18. meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa melalui fasilitasi penyusunan RKP Desa agar selaras antara arah kebijakan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan daerah.
19. meningkatnya peran dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa melalui peningkatan kapasitas
20. fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa melalui penetapan Peraturan Bupati mengenai batas desa
21. fasilitasi penyusunan laporan kepala desa yang berisi gambaran umum tentang kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Bupati, BPD, dan/atau masyarakat desa
22. peningkatan kualitas perangkat desa melalui pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat
23. Pembinaan BUM Desa kategori tumbuh
24. Pendampingan BUMDesa dan BUMDesMa dalam pengelolaan ketahanan pangan
25. Pendampingan BUMDesa menjadi kategori Maju (1 BUMDesa)
26. Pemberdayaan masyarakat melalui PKK dan RT RW untuk memilah dan mengolah sampah dari rumah

Tahun 2030 Terwujudnya pondasi transformasi menuju akselerasi transformasi untuk mencapai Pemalang MULYA. Tahun ini merupakan transisi pada periode I menuju periode II RPJPD. Berikut ini prioritas tahun 2030

1. Meningkatnya pembangunan desa dengan terpenuhinya Sarana dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

prasarana Desa sesuai dokumen perencanaan Desa sebagai upaya pemerataan pembangunan dalam menata desa melalui Fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa

2. Sinergitas Pemerintah Kabupaten dengan TNI dan Forkopimda dalam memfasilitasi Pembangunan sarana dan prasarana Desa melalui Fasilitasi Pelaksanaan TMMD
3. Pelaksanaan pembangunan sarana dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangan Desa dalam Fasilitasi Kewenangan Desa
4. Terwujudnya dokumen dan pemasangan patok batas desa yang jelas sesuai ketentuan dalam Fasilitasi Batas Desa
5. Evaluasi dan pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan produk
6. pembinaan dan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa
7. Fasilitasi pembayaran premi BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
8. fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa.
9. meningkatnya akuntabilitas, efektifitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa
10. Pelaksanaan Rapat koordinasi kepala desa dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Bupati Pemalang guna sinergitas pembangunan daerah dan desa serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Pemalang.
11. fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan
12. fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan
13. meningkatnya akuntabilitas, efektifitas dan transparansi pengelolaan aset desa
14. meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa melalui fasilitasi penyusunan RKP Desa agar selaras antara arah kebijakan pembangunan desa dengan
15. meningkatnya peran dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa melalui peningkatan kapasitas
16. fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa melalui penetapan Peraturan Bupati mengenai batas desa
17. fasilitasi penyusunan laporan kepala desa yang berisi gambaran umum tentang kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Bupati, BPD, dan/atau masyarakat desa

https://jdih.pemalangkab.go.id

18. peningkatan kualitas perangkat desa melalui pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat
19. Pembinaan BUM Desa kategori maju dan berkembang
20. Pendampingan BUMDesa dan BUMDesMa dalam pengelolaan ketahanan pangan
21. Pendampingan BUMDesa menjadi kategori Maju (1 BUMDesa)
22. Pemberdayaan masyarakat melalui PKK dan RT RW untuk memilah sampah dari rumah
23. Monitoring dan evaluasi Koperasi Desa Merah Putih

3.4 Arah Kebijakan DINPERMASDES Kabupaten Pemalang Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra DINPERMASDES Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya juga merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan/sub kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan berguna untuk menjamin ketercapaian, kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan dan mengantisipasi isu strategis, yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi, yang memberikan arahan dan panduan hasil rumusan strategi yang dipilih agar lebih optimal dalam mencapai tujuan dan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun mendukung pencapaian sasaran daerah dengan memperhitungkan dan antisipasi terhadap semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul.

Melalui strategi dan arah kebijakan maka akan terumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan tujuan daerah dan sasaran perencanaan pembangunan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. Selain itu, strategi dan arah kebijakan juga merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan

https://jdih.pemalangkab.go.id

baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Dalam menentukan arah kebijakan Renstra, perlu mendasari pada NSPK dan arah kebijakan RPJMD. Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Teknis Merumuskan Arah Kebijakan Renstra

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
1	2	3	4
		Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan difokuskan pada peningkatan Indeks Desa, Peningkatan peran BUMDes dalam pembangunan daerah, Peningkatan pembinaan dan pengawasan kecamatan dalam pembangunan desa dan kelurahan dan Pengembangan kerjasama antar desa;	Penyediaan perencanaan yang berkualitas dan pelaksanaan evaluasi kinerja yang efektif dan obyektif Penyediaan sarana prasarana kantor, kebutuhan kepegawaian, keuangan, dan administrasi pelayanan Meningkatnya kualitas penataan desa Meningkatnya kualitas kerjasama antar desa Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa Meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatas desa

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program pada DINPERMASDES Kabupaten Pemalang

Mendasarkan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Program disusun dengan memperhatikan sub bidang urusan sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Program yang akan dilaksanakan diharapkan dapat menjawab berbagai isu strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh DINPERMASDES Kabupaten Pemalang.

Program-program pembangunan yang tertuang dalam Renstra DINPERMASDES Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 diharapkan mampu memberikan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Adapun Program yang dilaksanakan DINPERMASDES Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu 2025 – 2029 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

   Program ini diarahkan untuk pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.

2. Program Penataan Desa

   Program ini menangani kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa, dimana aktivitas yang dilaksanakan adalah melakukan fasilitasi penyelenggaraan penataan desa.

3. Program Peningkatan Kerjasama Desa

   Program ini menangani kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa dimana aktivitas kegiatannya adalah fasilitasi kerjasama antar desa yang dilaksanakan.

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

   Program ini menangani Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dimana aktivitas kegiatannya adalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Program ini menangani kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dimana aktivitas kegiatannya adalah melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa/kelurahan.

Tabel 4.1

Persandingan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, RPJMD Kabupaten Pemalang dan Program pada DINPERMASDES Kabupaten Pemalang

Visi RPJMN	Visi RPJP Provinsi	Visi RPJMD Kabupaten	Program
mewujudkan desa yang mandiri, maju, dan sejahtera melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan desa yang baik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa	Desa maju dan berdaya melalui Pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, system informasi Desa (SID) dan Tim Tanggap Bencana	Meningkatnya kemandirian, Pembangunan Kawasan perdesaan dan membuka Kawasan pertumbuhan perekonomian baru.	• Program Penataan Desa. • Program Kerjasama Desa • Program Administrasi Pemerintahan Desa • Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Pemalang

Keterkaitan visi RPJMN dengan DINPERMASDES Kabupaten Pemalang antara lain program ketahanan pangan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). DINPERMASDES sangat terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kebijakan implementasi Dana Desa pada alokasi kegiatan ketahanan pangan dengan penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDes Ma) untuk penyediaan / sebagai pemasok bahan baku segar dan berkualitas untuk program MBG, sehingga memperkuat ekonomi desa sekaligus meningkatkan kualitas gizi Masyarakat dan melalui koperasi desa berperan sebagai lembaga strategis yang dapat mengelola, mengolah, dan mendistribusikan hasil pangan dari petani maupun nelayan, sehingga memotong rantai pasok yang panjang, menurunkan harga, meningkatkan

https://jdih.pemalangkab.go.id

pendapatan petani dan nelayan sehingga pada akhirnya memperkuat ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan keterkaitan DINPERMASDES Kabupaten Pemalang dengan visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah berperan dalam mewujudkan visi, khususnya dalam mewujudkan pembangunan desa yang maju dan berdaya. Salah satu upaya untuk mewujudkannya visi tersebut adalah mendukung penyusunan program "Kecamatan Berdaya", dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki peran sentral dalam pembentukan Kecamatan Berdaya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertugas membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, termasuk penyusunan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Kecamatan Berdaya, sebagai wilayah yang menjadi fokus pemberdayaan, mendapatkan dukungan penuh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam berbagai aspek, seperti peningkatan kapasitas pemerintahan desa, pengembangan ekonomi desa, serta pemberdayaan lembaga-lembaga desa.

4.2 Uraian Kegiatan pada DINPERMASDES Kebupaten Pemalang

Kegiatan disusun mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan berfungsi menterjemahkan kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan yang disusun secara tahunan ini menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program yang berdimensi waktu 5 (lima) tahun. Kegiatan yang dilaksanakan pada DINPERMASDES Kabupaten Pemalang adalah :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   Output dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   Output dari kegiatan ini Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   Output dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD (RKBU) yang disusun.
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   Output dari kegiatan ini adalah Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas.

https://jdih.pemalangkab.go.id

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   Output dari kegiatan ini adalah Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   Output dari kegiatan ini adalah Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia.
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   Output dari kegiatan ini adalah Jumlah barang milik daerah yang terpelihara
9. Penyelenggaraan Penataan Desa
   Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Desanya.
10. Fasilitasi Kerja sama antar Desa
    Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa yang terfasilitasi.
11. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
    Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Desa yang terbina dokumen Administrasi Pemerintahan Desanya
12. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
    Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terbina

4.3 Uraian Sub Kegiatan, Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif pada DINPERMASDES Kebupaten Pemalang

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Sub kegiatan merupakan bentuk konkrit aktivitas yang akan menopang kinerja kegiatan, dan menjadi tolok ukur kinerja awal pencapaian indikator yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DINPERMASDES Kabupaten Pemalang, berikut ini adalah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian Program Prioritas Daerah maupun Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah adalah sebgai berikut :

Tabel 4.2

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinpermasdes Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029

NPSK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kel
Meningkatnya daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal	Meningkatkan Kemandirian Desa				Indeks Desa		
		Meningkatnya Capaian Desa Mandiri			Persentase Desa Mandiri		
			Meningkat kualitas penataan desa		Indeks infrastruktur Desa	Program Penataan Desa	
				Jumlah Desa yang terfasilitasi penataan desanya	Desa yang terfasilitasi penataan desanya	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	
						Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	
			Meningkatnya kualitas kerjasama antar desa		Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa	
				Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa yang terfasilitasi	Dokumen Kerja Sama Antar Desa yang terfasilitasi	Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	
			Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa		Persentase Desa yang memiliki Administrasi Pemerintahan Desa Baik	Program Administrasi Pemerintahan Desa	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NPSK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Jumlah Desa yang terbina dokumen Administrasi Pemerintahan Desanya	Desa yang terbina dokumen Administrasi Pemerintahan Desanya	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
						Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	
						Sub Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	
						Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	
						Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	
						Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
			Meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan desa		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) yang produktif	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terbina	Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terbina	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NPSK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
						Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
						Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat/Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
		Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Perangkat Daerah			IKM Nilai SAKIP		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota		1. Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi 2. Persentase Capaian Layanan Umum dan Kepegawaian	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi	Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NPSK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi	Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Sub Kegiatan/Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Persentase Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi	Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi	Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NPSK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	
						Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas jabatan	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan mebel	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Pemalang

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan target serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif untuk DINPERMASDES Kabupaten Pemalang selama tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.3

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra DINPERMASDES Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline		Target Pagu Indikatif								Ket
			2024		2026		2027		2028		2029		2030		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Tujuan : Meningkatnya Kemandirian Desa	**Indeks Desa**	%	68,50	10,720,279,770	71,26	14,729,703,700	72,97	10,648,473,260	74,71	10,648,473,260	74,45	10,648,473,260	78,18	10,648,473,260	
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				10,720,279,770		14,729,703,700		10,648,473,260		10,648,473,260		10,648,473,260		10,648,473,260	
Sasaran 1 : Meningkatnya Capaian Desa Mandiri	Perentase Desa Mandiri	%	25,13	1,119,751,770	26,59	8,136,314,000	26,07	4,213,898,670	26,54	4,213,898,670	27,01	4,213,898,670	27,96	4,213,898,670	
1. Program Penataan Desa	Indeks infrastruktur Desa	%	5,47	951,185,650	5,61	325,000,000	5,75	266,532,100	5,88	266,532,100	6,02	266,532,100	6,16	266,532,100	
Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Desa yang terfasilitasi Penataan Desanya	Desa	307	951,185,650	380	325,000,000	308	266,532,100	308	266,532,100	308	266,532,100	309	266,532,100	
Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Pembentukan, Penghapusan,Jumlah Desa yang Melakukan Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa	0	0	1	10,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	
Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Desa	0	0	3	80,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	
Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangan nya	Desa	0	0	25	10,000,000	3	3,000,000	3	3,000,000	3	3,000,000	3	3,000,000	
Sub Kegiatan Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Desa	0	0	1	10,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	
Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Unit	307	290,458,000	350	165,000,000	300	253,532,100	300	253,532,100	300	253,532,100	300	253,532,100	
2. Program Peningkatan Kerja Sama Desa	**Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa**	%	17,51	220,242,550	17,95	120,000,000	18,39	193,138,810	18,82	193,138,810	19,26	193,138,810	19,70	193,138,810	
Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Dokumen Kerja Sama Antar Desa yang terfasilitasi	Dokumen	19	220,242,550	18	120,000,000	18	193,138,810	18	193,138,810	18	193,138,810	18	193,138,810	
Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kerjasama Antar Desa dalam kabupaten/kota yang terfasilitasi	Dokumen	14	30,242,550	14	50,000,000	14	38,138,810	14	38,138,810	14	38,138,810	14	38,138,810	
Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota yang terfasilitasi	Dokumen	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	
Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	9	170,000,000	2	50,000,000	2	135,000,000	2	135,000,000	2	135,000,000	2	135,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline		Target Capaian Indikatif										Ket
			2024		2026		2027		2028		2029		2030		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa	**Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa**		**8,76**	**3,019,699,170**	**9,08**	**8,859,700,000**	**9,19**	**3,019,699,170**	**9,41**	**3,019,699,170**	**9,63**	**3,019,699,170**	**9,85**	**3,019,699,170**	
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Desa yang terbina dokumen Administrasi Pemerintahan Desanya**	**%**	**212**	**3,019,699,170**	**212**	**8,859,700,000**	**212**	**3,019,699,170**	**212**	**3,019,699,170**	**212**	**3,019,699,170**	**212**	**3,019,699,170**	
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	13	2,483,078,930	12	2,900,000,000	12	2,900,000,000	12	2,900,000,000	12	2,900,000,000	12	2,900,000,000	
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	9	236,138,940	2	40,000,000	2	25,699,170	2	25,699,170	2	25,699,170	2	25,699,170	
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	1	2,100,000	1	11,880,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	8	118,804,800	7	80,000,000	1	10,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	
Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	0	0	80	50,000,000	14	5,000,000	14	5,000,000	14	5,000,000	14	5,000,000	
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Laporan	0	0	1	5,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	
Sub Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dokumen	0	0	4	10,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	0	0	1	10,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	1	6,483,220	178	3,228,640,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan	2	14,583,180	1	50,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Dokumen	1	3,552,940	1	30,200,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Sub Kegiatan Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa tersusun	Dokumen	1	38,585,480	3	150,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	1	4,200,060	1	15,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline		Target Capaian Indikator								Ket
			2024		2026		2027		2028		2029		2030		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	28	21,476,080	25	12,880,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	
Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Desa	1	5,886,400	11	110,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	
Sub Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Laporan	1	2,100,000	1	5,350,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	
Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Dokumen	0	0	1	50,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan kelurahan	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Dokumen	2	75,601,950	2	100,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
6. Program Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	**Persentase Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)**	**%**	**8,56**	**928,824,400**	**6,71**	**1,031,514,000**	**6,89**	**734,728,590**	**7,05**	**734,728,590**	**7,22**	**734,728,590**	**7,38**	**734,728,590**	
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terbina**		**38**	**928,824,400**	**41**	**1,031,514,000**	**41**	**734,728,590**	**41**	**734,728,590**	**41**	**734,728,590**	**41**	**734,728,590**	
Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	3	12,020,000	4	30,000,000	4	25,000,000	4	25,000,000	4	25,000,000	4	25,000,000	
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga AdatDesa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga AdatDesa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Lembaga	4	50,250,400	4	100,000,000	4	84,728,590	4	84,728,590	4	84,728,590	4	84,728,590	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline		Target Pagu Indikatif										Ket
			2024		2026		2027		2028		2029		2030		
			x	Rp	x	Rp	x	Rp	x	Rp	x	Rp	x	Rp	
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit	0	0	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1	150,000,000	1	150,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	
Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1	86,554,000	1	86,554,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen	0	0	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	
Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	28	690,000,000	28	600,000,000	28	450,000,000	28	450,000,000	28	450,000,000	28	450,000,000	
Sasaran 2 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan dan Akuntabilitas Perangkat Daerah	**IKM Nilai SAKIP**		**82,00 67,18**	**1,400,528,000**	**82,35 67,68**	**6,981,889,700**	**82,45 68,18**	**6,434,574,590**	**81,75 68,88**	**6,434,574,590**	**82,45 69,18**	**6,434,574,590**	**83,15 70,28**	**6,434,574,590**	
1. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	**Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian Yang Terpenuhi**	**%**	**100**	**1,142,950,000**	**100**	**1,377,163,700**	**100**	**1,377,787,290**	**100**	**1,377,787,290**	**100**	**1,377,787,290**	**100**	**1,377,787,290**	
	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja sesuai Regulasi	**%**	**100**	**4,497,598,000**	**100**	**4,816,226,000**	**100**	**1,056,787,300**	**100**	**5,056,787,300**	**100**	**5,056,787,300**	**100**	**5,056,787,300**	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu dan akuntabel**	**dokumen**	**12**	**18,800,000**	**24**	**42,500,000**	**23**	**60,000,000**	**23**	**60,000,000**	**23**	**60,000,000**	**23**	**60,000,000**	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	3	1,750,000	5	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline		Target Pagu Indikatif									
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen	1	2,450,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	Dokumen	1	2,450,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	2,450,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	2,450,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	2	2,800,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	4	2,600,000	14	5,000,000	14	5,000,000	14	5,000,000	14	5,000,000	14	5,000,000	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	0	-	1	7,500,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi**	**%**	**37**	**4,466,748,000**	**37**	**4,822,126,000**	**37**	**5,071,787,300**	**37**	**5,071,787,300**	**37**	**5,071,787,300**	**37**	**5,071,787,300**	
Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang / Bulan	12	4,466,848,000	12	4,811,226,000	12	5,051,787,300	12	5,051,787,300	12	5,051,787,300	12	5,051,787,300	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	dokumen	12	2,500,000	12	2,500,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Dokumen	1	2,100,000	1	2,100,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	
Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen hasil rangkapan pemeriksaan yang dipusat	Dokumen	1	1,600,000	1	1,600,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline		Target Pagu Indikatif								Ket
			2024		2026		2027		2028		2029		2030		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulanan semesteran SKPD	Dokumen	11	4,700,000	12	4,700,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi**	**%**	**3**	**1,185,000**	**2**	**1,740,000**	**2**	**2,000,000**	**2**	**2,000,000**	**2**	**2,000,000**	**2**	**2,000,000**	
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	2	1,185,000	2	1,740,000	2	2,000,000	2	2,000,000	2	2,000,000	2	2,000,000	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi**	**%**	**0**	-	**45**	**50,000,000**	**45**	**50,000,000**	**45**	**50,000,000**	**45**	**50,000,000**	**45**	**50,000,000**	
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	-	45	50,000,000	45	50,000,000	45	50,000,000	45	50,000,000	45	50,000,000	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang dilaksanakan sesuai regulasi**	**%**	**44**	**484,285,000**	**42**	**721,090,500**	**42**	**443,798,900**	**42**	**443,798,900**	**42**	**443,798,900**	**42**	**443,798,900**	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	4,000,000	4	5,000,000	4	3,000,000	4	3,000,000	4	3,000,000	4	3,000,000	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	1,400,000	4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	6	77,855,000	6	80,201,600	6	82,298,900	6	82,298,900	6	82,298,900	6	82,298,900	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	Paket	4	6,096,000	3	6,806,900	3	5,000,000	3	5,000,000	3	5,000,000	3	5,000,000	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	2	9,400,000	2	9,882,000	2	8,500,000	2	8,500,000	2	8,500,000	2	8,500,000	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12	183,708,000	12	189,220,000	12	200,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Dokumen	12	60,376,000	12	150,000,000	12	140,000,000	12	140,000,000	12	140,000,000	12	140,000,000	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**	**%**	**8**	**60,376,000**	**8**	**100,000,000**	**8**	**200,000,000**	**8**	**200,000,000**	**8**	**200,000,000**	**8**	**200,000,000**	
Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau	unit	0	-	3	75,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	8	60,376,000	5	100,000,000	5	150,000,000	5	150,000,000	5	150,000,000	5	150,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline 2024		Target Rapu Indikatif								Ket
					2025		2027		2028		2029		2030		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	%	**100**	**445,480,000**	**114**	**447,770,800**	**122**	**431,292,790**	**122**	**425,292,790**	**122**	**425,292,790**	**122**	**425,292,790**	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1,000,000	12	1,000,000	12	1,000,000	12	1,000,000	12	1,000,000	12	1,000,000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	134,142,000	12	138,167,000	12	147,212,990	12	147,212,990	12	147,212,990	12	147,212,990	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	8,860,000	4	9,125,800	4	9,125,800	4	9,125,800	4	9,125,800	4	9,125,800	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	299,478,000	12	299,478,000	12	287,954,000	12	287,954,000	12	287,954,000	12	287,954,000	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	%	**99**	**173,604,000**	**97**	**258,562,400**	**41**	**256,695,800**	**41**	**256,695,800**	**41**	**256,695,800**	**41**	**256,695,800**	
Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan disediakan Pajaknya	unit	28	64,394,000	26	97,123,100	30	97,123,100	30	97,123,100	30	97,123,100	30	97,123,100	
Sub Kegiatan Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	0	-	4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	4,360,000	4	4,438,300	4	4,572,900	4	4,572,940	4	4,572,500	4	4,572,500	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	Unit	3	75,000,000	3	150,000,000	3	150,000,000	3	150,000,000	3	150,000,000	3	150,000,000	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas DINPERMASDES Kabupaten Pemalang Dalam Mendukung Program Prioritas

Tabel 4.4

Daftar Sub Kegiatan Prioritas DINPERMASDES Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	Program Penataan Desa	Meningkatnya kualitas penataan desa	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	
			Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	
			Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	
2	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Meningkatnya kualitas kerjasama antar desa	Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
			Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	
			Sub Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	

https://jdih.pemalangkab.go.id

			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	
			Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	
			Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
	Program Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan desa	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
			Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga AdatDesa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra DINPERMASDES Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) DINPERMASDES KABUPATEN PEMALANG

No	Indikator	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Desa	%	69,50	71,24	72,97	74,71	76,45	78,18	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab Pemalang

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Adapun indikator kinerja Kunci yang akan dicapai DINPERMASDES Kabupaten Pemalang sesuai tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Target Indikator Kinerja Kunci DINPERMASDES Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	81.13	81.40	81.67	81.94	82.21	82.48	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB V

P E N U T U P

Dalam rangka mewujudkan *Good Governance* dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Pemalang harus terus meningkatkan efektifitas, efensiensi dan inovasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dalam kerangka Visi **"Pemalang BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA".** Visi tersebut menjadi acuan dari gerak dan langkah seluruh komponen dan elemen dilingkungan DINPERMASDES Kabupaten Pemalang dan diperlukan satu pemahaman dari semua unsur guna menciptakan keselarasan dalam mewujudkan visi dimaksud. Kemudian pada setiap akhir tahun juga perlu dilakukan evaluasi dan kajian terhadap kemajuan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana Strategis (Renstra) Dinpermasdes Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 ini disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) ini juga merupakan kerangka acuan bagi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) DINPERMASDES Kabupaten Pemalang yang disusun setiap tahunnya.

Rencana Strategis (Renstra) DINPERMASDES Kabupaten Pemalang, berisi program-program dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya indikatif, yang telah disesuaikan dengan Program dan Kegiatan yang ada pada Sekretariat dan Bidang di Lingkungan DINPERMASDES Kabupaten Pemalang. Selanjutnya setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan anggaran/dana yang tersedia.

Dalam pelaksanaan Renstra DINPERMASDES Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan dan peraturan perundang-undangan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Renstra DINPERMASDES Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029 yang akan terwujud dalam Perubahan Renstra DINPERMASDES Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Strategi (Renstra) DINPERMASDES Kabupaten Pemalang ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami perlukan demi perbaikan Renstra ini. Dan kami berharap agar Rencana Strategis (Renstra) ini dapat diimplementasikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya di lingkungan DINPERMASDES Kabupaten Pemalang.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN PEMALANG

Drs. AHMADY STIAWAN WIDATMOJO, AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19770412 199511 1 001

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang penting dan strategis dalam menentukan arah pembangunan ke depan baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Inmendagri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Regulasi tersebut salah satunya mengamanatkan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama lima tahun kedepan.

Renstra Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Gambar 1.1.
Keterkaitan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Sektor Lainnya

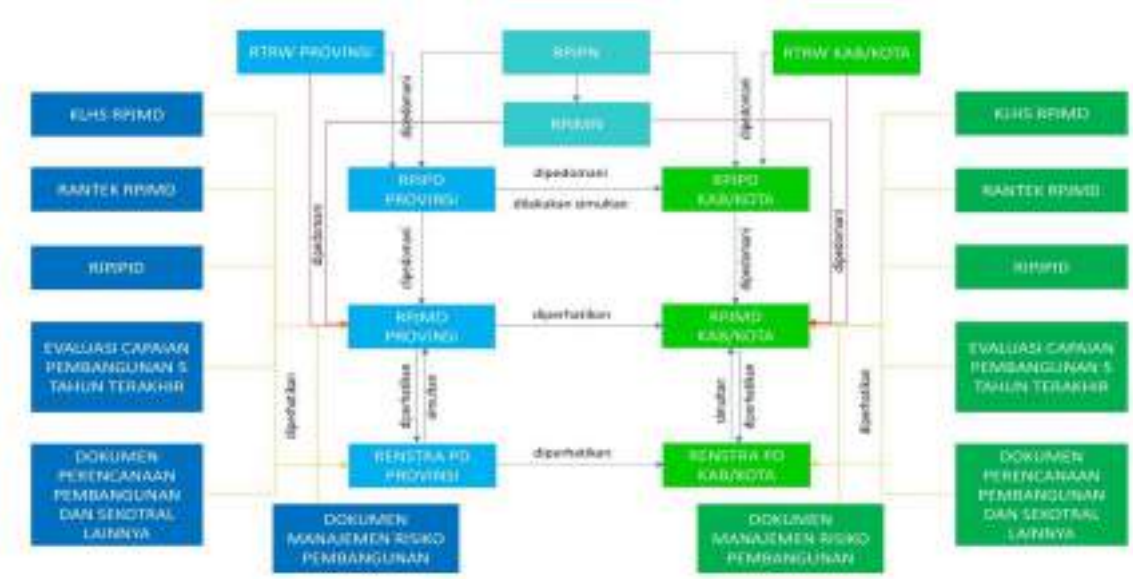

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang mempunyai kewajiban untuk menetapkan Renstra Perangkat Daerah untuk periode lima tahunan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Gambar 1.2.

Pentahapan Penyusunan Renstra

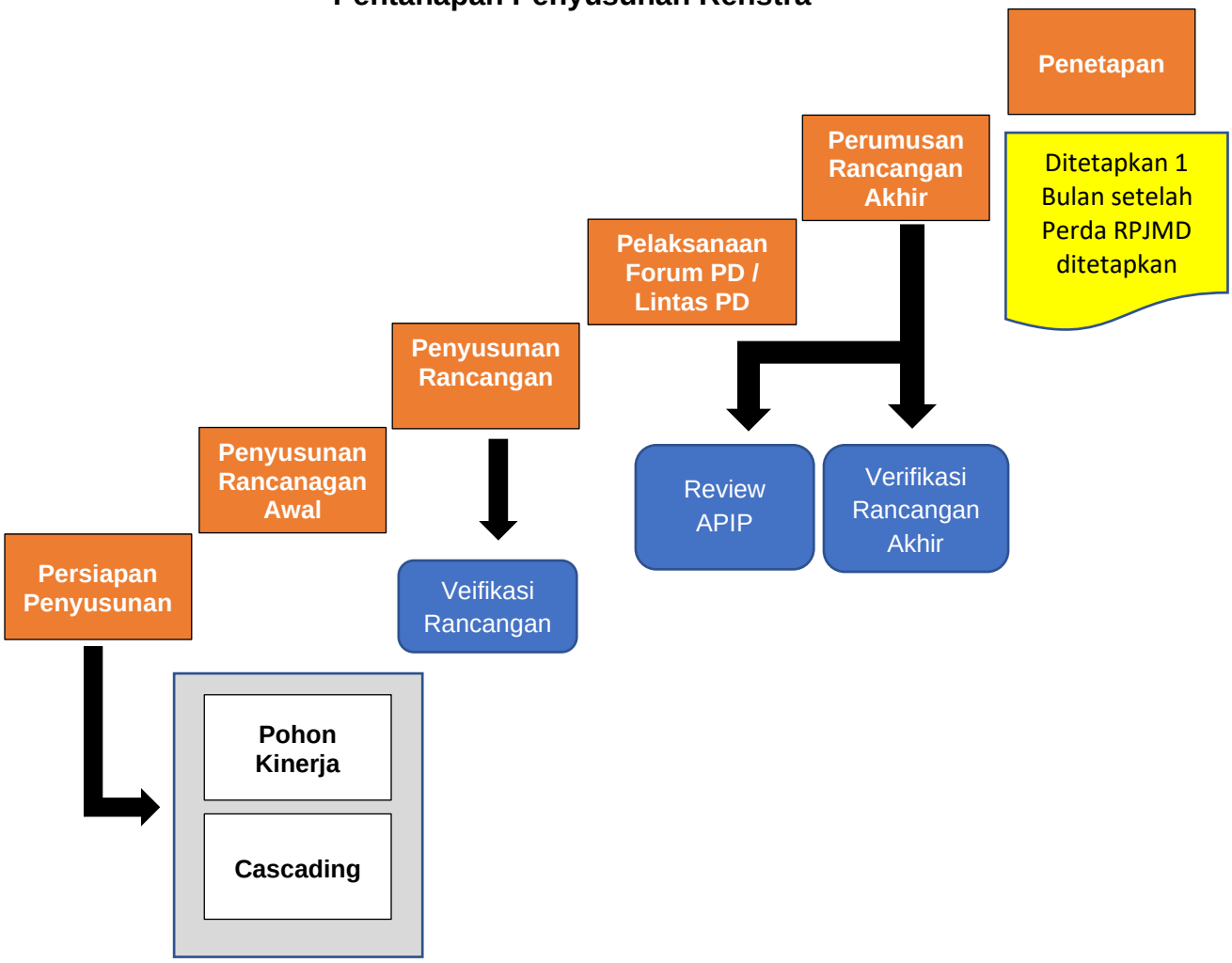

Seiring dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Pemalang periode 2025-2029, maka pemerintah menyusun RPJMD Kabupaten tahun 2025-2029. Dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 tersebut terdapat visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu "**TERWUJUDNYA KABUPATEN PEMALANG YANG BERCAHAYA-BERSIH, CAKAP, HANDAL DAN MULYA**" dengan misinya **"RHAPSODI"** yaitu Resik, Hijau, Apik, Peduli, Silaturahmi, Organisatoris, Digitalisasi dan Ikhlas. Dengan demikian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ini berfungsi untuk menjabarkan secara eksplisit Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas, pagu indikatif serta indikator pencapaian pengembangan pelayanan dinas.

https://jdih.pemalangkab.go.id

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); yang telah mengalami beberapa perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) yang telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

https://jdih.pemalangkab.go.id

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

https://jdih.pemalangkab.go.id

Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6881);
21. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
22. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga –Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang –Temanggung, dan Kawasan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
24. Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standat Pelayanan Minimal;

https://jdih.pemalangkab.go.id

33. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaaan Brebes-Tegal-Slawi – Pemalang Tahun 2016 – 2036 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
37. Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor xxx Tahun xxx Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Tahun xxx Nomor xxx);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 9)
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 - 2038

https://jdih.pemalangkab.go.id

(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 9);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 -2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 -2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor xxx Tahun xxx Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
45. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Peyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pelayanan Terpadu satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 nomor 27);
46. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan dalam mewujudkan Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah.
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan unsur penunjang bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu.
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.
4. Sebagai pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sau Pintu Kabupaten Pemalang dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

1.1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id

1.2. Landasan Hukum

Mengidentifikasikan dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 serta disusun sesuai kaidah penyusunan produk hukum.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

1.4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggungjawab DPMPTSP Kabupaten Pemalang dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Menyajikan tugas, fungsi dan struktur DPMPTSP Kabupaten Pemalang

2.1.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

Menyajikan data-data dan informasi sumberdaya DPMPTSP Kabupaten Pemalang yang meliputi sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menyajikan data-data dan informasi pelayanan yang menjadi urusan dan tanggung jawab DPMPTSP Kabupaten Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Mengidentifikasikan masyarakat yang terlibat dalam urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Mengidentifikasikan permasalahan dan isu strategis yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Pemalang dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Pemalang.

2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah

Mengidentifikasikan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Pemalang

2.2.2. Isu Strategis

Mengidentifikasikan isu strategis sesuai lingkungan dinamis yang dapat mempengaruhi DPMPTSP Kabupaten Pemalang baik secara langsung maupun tidak langsung

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menyajikan tujuan, sasaran dan arah kebijakan Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Menentukan tujuan Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang berdasarkan NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Menentukan Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang berdasarkan NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat

3.3. Strategi Perangkat Daerah

Menentukan strategi Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang berisi tindakan yang komprehensif yang akan dilakukan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Menyajikan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tuga dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Pemalang

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menyajikan program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan penanaman modal dan urusan pelayanan terpadu satu pintu

4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Menyajikan program, kegiatan dan subkegiatan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output.

4.2. Uraian Subkegiatan Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Menyajikan uraian subkegiatan prioritas yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi pedoman pembangunan daerah dan dapat diterjemahkan menjadi aksi-aksi nyata yang dapat diimplementasikan oleh DPMPTSP Kabupaten Pemalang.

4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Menyajikan indikator kinerja utama atau IKU DPMPTSP Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta menjadikan IKU tersebut sebagai prioritas utama

4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Menyajikan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis DPMPTSP Kabupaten Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB V. PENUTUP

Menyajikan kesimpulan penting subtansial, kaidah pelaksanaan serta pelaksanaan pengendalian evaluasi

5.1. Kesimpulan Penting Subtansial

Menyajikan kesimpulan penting substansial Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Menyajikan kaidah pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

5.3. Pelaksanaan Pengendalian Evaluasi

Menyajikan Pelaksanaan pengendalian evaluasi Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 bertujuan untuk memastikan pencapaian target program dan kegiatan, menilai kinerja serta mengendalikan risiko strategis DPMPTSP Kabupaten Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB 2
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1. Gambaran Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Pemalang

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

2.1.1.1. Tugas Dan Fungsi

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang menyatakan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pelaksanaan Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dilaksanakan oleh masing-masing Bidang dan Sekretariat.

1. **Kepala Dinas**

   Kepala DPMPTSP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala DPMPTSP menyelenggarakan fungsi:

   1) Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
   2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
   3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

https://jdih.pemalangkab.go.id

4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Menetapkan rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
b. Merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).
c. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
d. Mengarahkan penyelenggaraan program pengembangan iklim penanaman modal yang meliputi penetapan kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal, evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal, penyusunan rencana umum penanaman modal Daerah, serta penyediaan peta potensi dan peluang usaha Daerah.
e. Mengarahkan penyelenggaraan program promosi penanaman modal yang meliputi penyusunan strategi promosi penanaman modal, dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal Daerah
f. Mengarahkan penyelenggaraan program pelayanan penanaman modal yang meliputi penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal, penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan, serta koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/ insentif Daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id

g. Mengarahkan penyelenggaraan program pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang meliputi koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal, koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal, serta koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
h. Mengarahkan penyelenggaraan program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal yang meliputi pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terin tegrasi secara elektronik.
i. Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
j. Mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan unsur spip.
k. Mengarahkan pengelolaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
l. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan terpadu satu pintu.
m. Merumuskan inovasi daerah urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.
n. Merumuskan laporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DPMPTSP.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan DPMPTSP

https://jdih.pemalangkab.go.id

b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan DPMPTSP
c. Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan DPMPTSP
d. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan DPMPTSP
e. Penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi
f. Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DPMPTSP
g. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan DPMPTSP
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan.
b. Mengoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
c. Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan.
d. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengelolaan dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kedinasan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggan, barang milik daerah, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dokumentasi dan pengadaan barang/ jasa.
e. Menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian.
f. Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik.
g. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan unsur SPIP.

https://jdih.pemalangkab.go.id

h. Menyusun konsep inovasi kesekretariatan.
i. Mengoordinasikan konsep inovasi daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
j. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan.
k. Mengoordinasikan penyusunan laporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

3. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program dan keuangan. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. merencanakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan dokumen perencanaan.
b. menyusun usulan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
c. melaksanakan pengelolaan administrasi bina program dan keuangan.
d. mengelola data urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
e. melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran.
f. menyusun konsep dokumen pertanggungjawaban kinerja yang meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP), Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dokumen pertanggungjawaban lainnya.
g. menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta laporan keuangan lainnya.
h. menyiapkan bahan inovasi Subbagian Bina Program dan Keuangan

https://jdih.pemalangkab.go.id

i. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan unsur SPIP.
j. mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Bina Program dan Keuangan.
k. menyusun bahan laporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
l. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan.
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. merencanakan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
b. mengelola administrasi barang milik daerah meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pengamanan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, penatausahaan, pemanfaatan dan penyusunan laporan barang milik daerah.
c. mengelola administrasi umum, meliputi surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan.
d. mengelola administrasi kehumasan meliputi keprotokolan dan informasi publik.
e. mengelola administrasi kerumahtanggaan meliputi pengadaan, penyediaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan jasa penunjang, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas.
f. mengelola administrasi kepegawaian.

https://jdih.pemalangkab.go.id

g. mengelola ketatalaksanaan meliputi penyusunan sistem dan prosedur kerja.
h. melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik.
i. menyiapkan bahan inovasi Subbagian Umum dan Kepegawaian.
j. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian.
k. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian.
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyusun bahan rancangan strategis pengembangan iklim penanaman modal
b. menyusun bahan rancangan penetapan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah
c. menyusun data dan informasi peta potensi investasi
d. menyusun rencana target investasi penanaman modal daerah
e. melaksanakan kegiatan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
f. melaksanakan kegiatan sosialisasi tata cara dan prosedur pelayanan penanaman modal
g. memfasilitasi kerjasama dengan pihak perguruan tinggi, lelmbaga swadaya masyarakat, asosiasi usaha, lembaga-lembaga internasional maupun pemangku kepentingan lainnya terkait pengembangan penanaman modal
h. memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tentang ketentuan pelaksanaan dan pengendalian penanaman modal
i. melaksanakan kegiatan inventarisasi hambatan dan solusi penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
j. memfasilitasi penanganan pengaduan pelaksanaan kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

https://jdih.pemalangkab.go.id

k. menyelenggarakan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas dan onsetif yang diberikan serta melaksanakan pemeriksaan ke lokasi proyek sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan
l. melaksanakan tindaklanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan Penanaman Modal
m. mengelola system pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) terkait dengan Aplikasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal
n. melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis terkait daerah.

6. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kelompok jabatan fungsional substansi pelayanan terpadu satu pintu memiliki uraian tugas sebagai berikut:

a. merumuskan konsep strategi pengembangan pelayanan dan perizinan tidak terstruktur.
b. melaksanakan kegiatan pelayanan perizinan dan nonperizinan tidak terstruktur secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
c. melaksanakan kegiatan pengembangan kompentensi sumber daya manusia.
d. melaksanakan kegiatan penelitian kepuasan masyarakat secara berkala terhadap pelayanan.
e. menyusun bahan koordinasi dan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi usaha, lembaga-lembaga intemasional maupun pemangku kepentingan lainnya.
f. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan tidak terstruktur yang terintegrasi pada tingkat Pemerintah Daerah.
g. melaksanakan kegiatan pendaftaran perizinan melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
h. merumuskan konsep strategi pengelolaan perizinan terstruktur.

https://jdih.pemalangkab.go.id

i. melaksanakan kegiatan pelayanan penzman dan nonpenzman tersetruktur secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
j. melaksanakan sosialisasi tata cara dan prosedur perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
k. melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap masa berlaku izin dan peruntukan izin usaha bersama dengan OPD terkait.
l. melaksanakan kegiatan koordinasi tim teknis yang terdiri dari unsurunsur perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang pelayanan perizinan.
m. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan terstruktur yang terintegrasi pada tingkat Pemerintah Daerah.
n. melakukan proses perizinan melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

2.1.1.2 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Bina Program dan Keuangan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. UPTD
d. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas:
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya

https://jdih.pemalangkab.go.id

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi

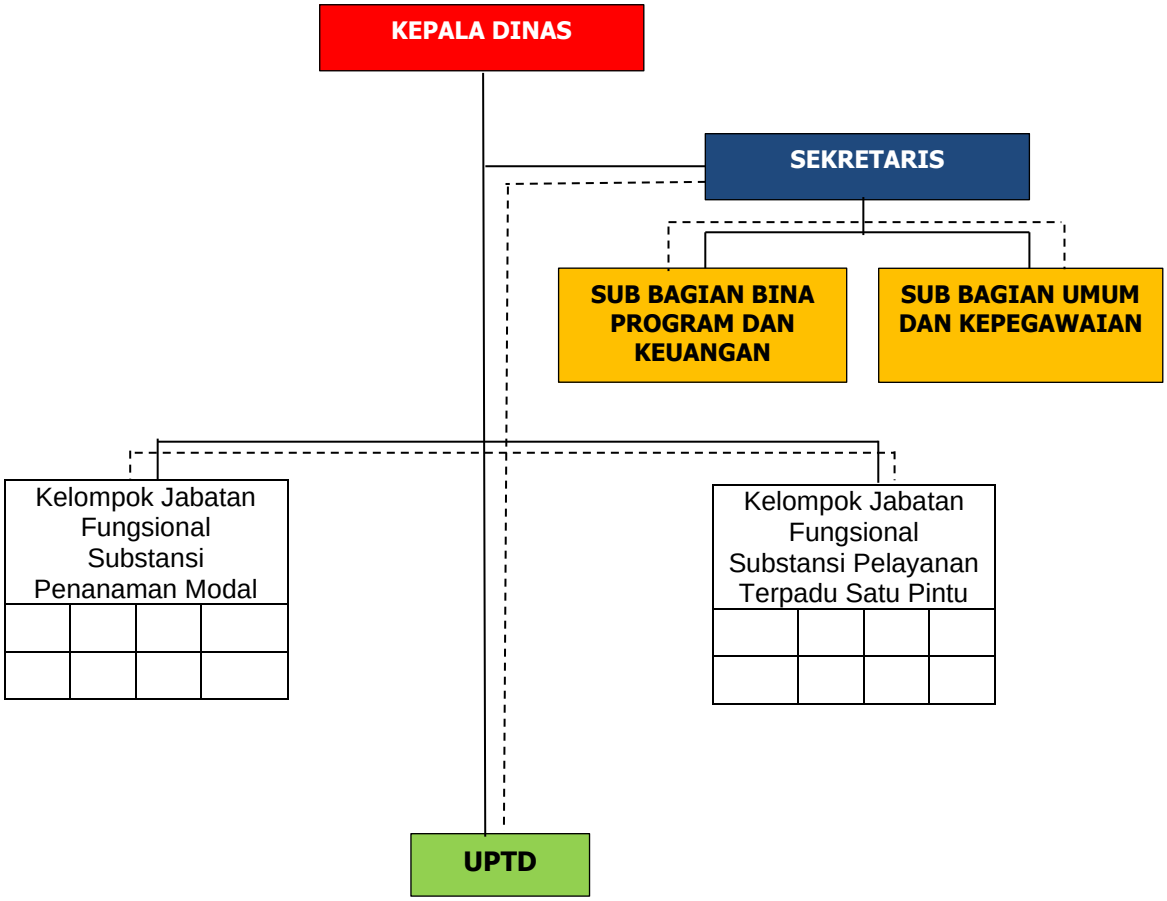

2.1.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang didukung dengan personalia dan sarana prasarana yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

2.1.2.1. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia yang dimiliki DPMPTSP Kabupaten Pemalang adalah sebanyak 64 orang yang terdiri dari 32 orang berstatus ASN dan 32 orang berstatus Non ASN.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.1.

Sumberdaya Manusia DPMPTSP Kabupaten Pemalang

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	4	3	11	4	22
3	D3	3	-	-	-	3
4	S1	8	11	10	6	35
5	S2	3	-	1	-	4
6	S3	-	-	-	-	-

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pemalang

Tabel 2.2.

Sumberdaya Manusia DPMPTSP Kabupaten Pemalang

Berdasarkan Golongan

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	5	3	8
3	Golongan III	10	11	21
4	Golongan IV	2	1	3

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pemalang

2.1.2.2. Sarana Dan Prasarana

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki aset tidak bergerak dan bergerak yang terdiri dari :

Tabel 2.3.

Daftar Barang Inventaris

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1	Station Wagon	Unit	5	0	5
2	Sepeda Motor	Unit	11	0	11
3	Meja Komputer	Set	1	0	1
4	PC Unit	Unit	41	0	41
5	Printer	Unit	37	0	37

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
6	Lemari Kayu	Buah	6	0	6
7	Rak Kayu	Buah	17	0	17
8	White Board	Buah	2	0	2
9	Jam Mekanis	Buah	2	0	2
10	Kursi Besi	Buah	2	0	2
11	Exhause Fan	Unit	1	0	1
12	Televisi	Unit	2	0	2
13	Alat Rumah Tangga	Buah	5	0	5
14	Laptop	Unit	24	0	24
15	Peralatan Personal Kantor	Buah	3	0	3
16	Hub	Buah	1	0	1
17	Portable Generating Set	Set	1	0	1
18	Mesin fotocopy folio	Unit	1	0	1
19	Rak Besi	Buah	12	0	12
20	Papan Visual	Buah	1	0	1
21	Alat Penghancur Kertas	Unit	1	0	1
22	Papan Nama Instansi	Buah	1	0	1
23	Meja Rapat	Buah	20	0	20
24	Meja Resepsionis	Buah	12	0	12
25	Kursi Rapat	Buah	89	0	89
26	Bangku Tunggu	Set	10	0	10
27	Sofa	Set	2	0	2
28	AC Window	Unit	6	0	6
29	AC Split	Unit	20	0	20
30	Microphone Table Stand	Set	10	0	10
31	Camera Video	Unit	1	0	1
32	Tiang Bendera	Buah	1	0	1
33	Tangga Alumunium	Buah	1	0	1
34	Dispenser	Unit	5	0	5
35	Alat Pemadam Portable	Buah	4	0	4
36	Meja Kerja Pejabat Eselon III dan IV	Buah	14	0	14
37	Scanner	Unit	4	0	4
38	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Buah	62	0	62
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon III dan IV	Buah	14	0	14
40	Mesin Antrian	Unit	2	0	2
41	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Buah	52	0	52
42	Audio Visual	Set	2	0	2
43	Wireless Mic	Set	1	0	1
44	Professional Sound System	Set	7	0	7

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
45	Peralatan Studio Audio	Set	2	0	2
46	Camera Elektronik	Unit	1	0	1
47	Telephone (PABX)	Unit	1	0	1
48	Monitor	Unit	3	0	3
49	Peralatan Jaringan Lainnya	Set	1	0	1
50	Peralatan Personal Komputer	Set	3	0	3
51	Alat Kantor Lainnya	Set	10	0	10
52	Telephone Mobile	Unit	8	0	8
53	Server	Set	2	0	2
54	Sepeda	Unit	1	0	1
55	Mesin Penghisap Debu	Unit	1	0	1
56	Mesin Pemotong Rumput	Unit	1	0	1
57	Mesin Absensi	Unit	3	0	3
58	Kursi Rapat	Buah	19	0	19
59	Amplifier	Set	1	0	1
60	Loudspeaker	Set	10	0	10
61	Filing Cabinet Kayu	Buah	8	0	8
62	Lemari Kaca	Buah	1	0	1
63	Modem	Buah	1	0	1
64	CCTV	Set	1	0	1
65	Digital LED Running Text	Unit	1	0	1
66	Slide Projector	Set	1	0	1
67	Layar Film	Set	1	0	1

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pemalang

2.1.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Pemalang

Untuk memberikan pelayanan dan pembinaan secara optimal kepada masyarakat luas di penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan program dan kegiatan untuk melayani dan membina masyarakat. Adapun pelayanan yang telah dilaksanakan adalah :

2.1.3.1. Pelayanan Perizinan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang saat ini melayani 44 jenis perizinan sesuai dengan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang..

Pada tahun 2024, jumlah permohonan perizinan yang masuk tercatat sebanyak 14.537 permohonan. Dari jumlah tersebut sebanyak 14.489 permohonan telah disetujui dan diterbitkan. Tabel di bawah ini juga menunjukan bahwa jenis perizinan terbanyak yang diterbitkan adalah Izin Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar bersubsidi Untuk Usaha Mikro yaitu sebesar 12.973 izin.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.4.

Pelayanan Perizinan

No	Jenis Ijin	2020			2021			2022			2023			2024		
		Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak
1	Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga	2	2	0	5	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Hotel	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Kolam Renang dan Pemandian Umum	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sertifikasi Laik Hygiene Rumah Makan dan Restoran	1	1	0	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT)	6	6	0	5	4	0	4	5	0	6	4	0	25	21	0
6	Izin Pemakaian Stadion Sirandu	0	0	0	0	0	0	2	2	0	13	9	0	12	9	0
7	Izin Pemakaian Lapangan Mulyoharjo	0	0	0	0	0	0	5	5	0	2	2	0	5	4	0
8	Izin Reklame															
	-Izin Penyelenggaraan Reklame	313	308	0	320	320	0	326	326	0	471	471	0	471	471	0
	-Rekomendasi Ijin Penyelenggaraan Reklame	16	6	1	12	8	1	10	9	0	14	11	0	13	9	0

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Jenis Ijin	2020			2021			2022			2023			2024		
		Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak
9	Ijin Usaha Pariwisata pada Kawasan Wisata Pantai Widuri Pemalang	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Ijin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (IPPSBW)	1	1	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Surat Ijin Operasional Panti	2	2	0	5	5	0	3	2	-	10	4	0	4	5	0
12	Izin Pemakaman	30	30	0	35	35	0	20	20	-	25	24	0	17	17	0
13	Izin Pengabuan Mayat	12	12	0	18	18	0	18	18	-	20	19	0	12	12	0
14	Rekomendasi Ijin Unit Transfusi Darah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
15	Izin Pendidikan Dasar	5	5	0	11	11	0	5	1	-	4	4	-	3	3	0
	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Formal	2	0	0	7	3	0	30	29	-	6	4	0	6	4	0
16	Izin Pendidikan Anak Usia Dini PAUD) dan Pendidikan Non Formal															
	- Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	4	4	0	-	-	-	3	3	-	1	0	0	3	2	0
	- Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Jenis Ijin	2020			2021			2022			2023			2024		
		Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak
17	Izin Pemakaian Alun-alun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Izin Pemakaian Taman Patih Sampun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	24	22	0	119	117	0	79	80	0	51	51	0	30	25	0
22	Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Jenis Ijin	2020			2021			2022			2023			2024		
		Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak
23	Izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Jenis Ijin	2020			2021			2022			2023			2024		
		Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak
26	Izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah Kabupaten yang bersangkutan	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Jenis Ijin	2020			2021			2022			2023			2024		
		Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak
32	Izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
35	Izin Reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
36	Izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) pelabuhan pengumpan lokal	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Jenis Ijin	2020			2021			2022			2023			2024		
		Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak
37	Izin Mendirikan Bangunan tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Izin Insidentil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Izin Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar bersubsidi Untuk Usaha Mikro	3924	3924	0	5249	5249	0	11296	11297	0	13365	13365	0	12972	12973	0

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Jenis Ijin	2020			2021			2022			2023			2024		
		Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak
43	Izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah																

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pemalang, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.1.3.2. Pelayanan Sistem Informasi DPMPTSP

Untuk memudahkan masyarakat maupun pelaku usaha dalam mengurus perizinan maupun untuk mencari informasi peluang investasi, DPMPTSP Kabupaten Pemalang juga telah mengembangan berbagai aplikasi digital sebagai berikut :

a. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu

Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu merupakan program Komputerisasi Sistem Pelayanan Perizinan yang merupakan alat bantu dalam pemrosesan perizinan yang meliputi proses pendaftaran, pendataan, entri data, verifikasi, penetapan, dan cetak secara terintegrasi.

Program ini memudahkan masyarakat dengan cukup membuat akun, mengirimkan persyaratan sesuai dengan layanan yang dibutuhkan dan memantau status permohonannya. Ketika status proses permohonan cek lokasi, maka pemohon cukup datang untuk menyerahkan dokumen asli yang dipersyaratkan.

Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu dapat diakses melalui http://izinonline.pemalangkab.go.id.

Gambar 2.2.

Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu

https://jdih.pemalangkab.go.id

b. Gerai Investasi Potensi Kabupaten Pemalang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang juga telah mengembangkan Gerai Investasi Potensi Kabupaten Pemalang.

Terobosan ini diperuntukkan guna meningkatkan kemudahan dan aksesibilitas pelayanan di bidang investasi. Gerai Investasi Potensi Kabupaten Pemalang ini, dimaksudkan agar para investor mendapatkan layanan konsultasi penanaman modal dan informasi yang cukup sebelum berinvestasi di Kabupaten Pemalang.

Gerai Investasi Potensi Kabupaten Pemalang ini memanfaatkan dukungan teknologi informasi berupa media web yang dapat diakses melalui website dpmptsp.pemalangkab.go.id yang sangat berguna bagi investor untuk bisa melihat peluang investasi sektor hortikultura, industri, perikanan, pertanian, peternakan dan pariwisata. Dalam media ini, investor juga dapat melihat informasi tata ruang dan lahan dari wilayah yang diinginkan.

Gambar 2.3.

Gerai Investasi Kabupaten Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

c. Sistem Aduan Masyarakat Berbasis Elektronik Langsung (SAMBATSUNG)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang melakukan terobosan untuk mewujudkan sistem pengaduan yang cepat, efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi elektronik. SAMBATSUNG yang merupakan singkatan dari Sistem Aduan Masyarakat Berbasis Teknologi Langsung ini dibuat bersama dengan pihak ke Tiga dan Tim Inovasi DPMPTSP Kabupaten Pemalang.

SAMBATSUNG selain memberikan kemudahan dalam proses pelayanan pengaduan baik bagi penyelenggara, pemohon maupun masyarakat umum, aplikasi ini juga memberikan kemudahan untuk mendapatkan berbagai informasi diantaranya jumlah pengakses portal pengaduan, grafik pengaduan, serta proses pengaduan. Sistem Aduan Masyarakat Berbasis Elektronik Langsung dapat diakses melalui laman izinonline.pemalangkab.go.id/2017/pengaduan2021/web.

Gambar 2.4.

Sistem Aduan Masyarakat Berbasis Elektronik Langsung (SAMBATSUNG)

2.1.3.3. Mal Pelayanan Publik

Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, DPMPTSP Kabupaten Pemalang saat ini juga telah mengembangkan Mal Pelayanan Publik. yang terletak di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pintu (DPMPTSP). Mal Pelayanan Publik bertujuan untuk menyatukan seluruh jenis pelayanan yang ada, ke dalam satu tempat dan tersistem. Hal ini merupakan wujud transformasi birokrasi pelayanan publik, dari berbelit-belit dan lambat, menjadi birokrasi modern, humanis, dan cepat. Saat ini terdapat 16 instansi pemerintah baik vertikal maupun horsontal yang telah berpartisipasi menempatkan petugasnya dalam MPP Kabupaten Pemalang.

Tabel 2.5.

Jenis Layanan dalam Mal Pelayanan Publik

No	Instansi	Jenis Perizinan
1	Badan Pertanahan Nasional	1. Informasi Pertanahan 2. Pertimbangan Teknis Pertanahan
2	BPJS Ketenagakerjaan	1. Infornasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja 2. Informasi Program Jaminan Kematian 3. Informasi Program Jaminan Hari Tua 4. Informasi Program Jaminan Pensiun 5. Informasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan 6. Pendaftaran Perusahaan 7. Pendaftaran Penerima Upah 8. Pendaftaran Bukan Penerima Upah 9. Pendaftaran Pekerja Migran Indonesia 10. Pendaftaran Sektor Jasa Konstruksi
3	BPJS Kesehatan	1. Pemberian Informasi 2. Pendaftaran Baru PBPU Mandiri 3. Perubahan Data
4	Bank Jateng	1. Pembayaran Pajak, Pendidikan dan Jasa Lainnya
5	PDAM	1. Pemasangan Sambungan Baru 2. Pembayaran Rekening 3. Pengaduan Pelanggan
6	Disdukcapil	1. Kartu Keluarga 2. KTP 3. Pindah Datang Penduduk 4. Akta Kelahiran 5. Akta Kematian 6. Akta Perkawinan 7. Akta Perceraian
7	Dinas Kesehatan	1. Perizinan Baru/Perpanjangan/Perubahan 1) SUHS 2) DAM 2. Perizinan Baru/Perpanjangan/Perubahan 1) Apotik 2) Toko Obat 3) Rumah Sakit 4) Puskesmas

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Instansi	Jenis Perizinan
		5) Klinik 6) UTD PMI
8	Bakesbangpol	1. Rekomendasi Kegiatan Penelitian
9	DLH	1. Persetujuan Lingkungan
10	DPUTR	1. Informasi Tata Ruang 2. PBG/SLF
11	Bapenda	1. Pendaftaran Wajib Pajak 2. Pembayaran Pajak Daerah (Pajak Hotel, Restoran,Hiburan, Parkir, Sarang Burung Walet, Minerba, Reklame, Air Tanah)
12	Diskoperindag	1. Perizinan Usaha Sektor Perindustrian (IUI, IPUI) 2. Pendaftara Merek 3. Pendaftaran Listrik Subsidin
13	Dishub	1. Perizinan Angkutan Orang
14	Disnaker	1. Kartu AK.1 / Kartu Kuning
15	DPMPTSP	1. Perizinan OSS 2. Perizinan Non OSS 3. Layanan Pengaduan 4. Layanan Informasi Investasi
16	Dindikbud	1. Surat Rekomendasi Mutasi Siswa SD/SMP 2. Surat Rekomendasi Penelitian Bidang Pendidikan

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pemalang, 2025

2.1.3.4. Pelayanan Penanaman Modal

Realisasi penanaman modal dalam kurun waktu 4 tahun terakhir menunjukan capaian yang lebih tinggi dibandingkan targetnya yaitu mencapai 107,37%. Sementara jumlah akumulai penanaman modal dari tahun 2010 sampai tahun 2024 mencapai Rp. 3,5 trilyun.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.6.

Realisasi Penanaman Modal

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2010		67.552.188.806	
2011		244.282.432.755	
2012		6.326.701.500	
2013		7.925.910.000	
2014		39.267.752.915	
2015		89.860.864.270	
2016	724.604.687.677	255.359.969.835	0,00
2017	729.604.687.677	28.890.500.000	0,00
2018	734.604.687.677	93.634.691.900	0,00
2019	739.604.687.677	1.753.353.206.637	0,00
2020	744.604.687.677	166.492.408.001	0,00
2021	168.157.332.081	171.698.900.267	102,11
2022	175.132.878.272	179.666.691.621	102,59
2023	185.056.692.369	197.152.213.713	106,54
2024	205.038.302.261	220.159.341.867	107,37
	Jumlah Akumulasi	**3.521.623.774.087**	

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pemalang, 2025

2.1.3.5. Pelayanan Pelaporan Penanaman Modal

Pelaporan penanaman modal, atau yang dikenal dengan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), adalah laporan yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala oleh setiap penanam modal mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi. LKPM mencakup realisasi investasi, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi (termasuk nilai ekspor), serta kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan investasi.

Jumlah perusahaan yang telah melaporkan kegiatan penanaman modalnya menunjukan perkembangan yang semakin meningkat yaitu dari 171 perusahaan di tahun 2020 menjadi 1.298 perusahaan di tahun 2024, sebagaimana tabel berikut ini.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.7.

Perkembangan LKPM

Tahun	Status Laporan			Total
	Draft	Perlu Perbaikan	Disetujui	
2020	18	35	118	**171**
2021	30	68	300	**398**
2022	21	97	312	**430**
2023	4	209	667	**880**
2024	4	127	1.167	**1.298**

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pemalang, 2025

2.1.3.6. Pelayanan Pengaduan

Jumlah pengaduan terkait perizinan yang masuk di DPMPTSP Kabupaten Pemalang selama 5 tahun terakhir jumlahnya berfluktuasi dengan rata-rata 6 sampai 7 pengaduan per tahun. Dari pengaduan yang masuk ini, kesemuanya dapat diselesaikan oleh DPMPTSP Kabupaten Pemalang.

Tabel 2.8.

Jumlah Pengaduan Yang Telah Dilayani

No	Tahun	Jumlah Aduan	Hasil
1	2020	7	Selesai
2	2021	6	Selesai
3	2022	10	Selesai
4	2023	1	Selesai
5	2024	8	Selesai

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pemalang, 2025

2.1.3.7. Target dan Realisasi Kinerja Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sesuai dengan Indikator program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 telah melaksanakan kinerja pelayanan sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

a. Peningkatan jumlah investor

Realisasi peningkatan PMA dan PMDN menunjukan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan targetnya spada tahun 2022 dan tahun 2023 dengan rasio capaian sebesar 2.539% dan 177,38%. Namun demikian realisasi peningkatan jumlah investor ini mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi -827,1%. Penurunan jumlah investor ini perlu menjadi perhatian karena berkorelasi dengan semakin tidak baiknya iklim penanaman modal di Kabupaten Pemalang.

b. Terselenggaranya promosi penanaman modal

Realisasi terlaksananya promosi penanaman modal menunjukan capain kinerja yang sesuai dengan target yang direncanakan. Kecuali untuk tahun 2021 dimana target 100% tidak tercapai karena refocusing anggaran sehingga tidak ada kegiatan promosi yang dilakukan.

c. Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal

Dalum kurun waktu 4 tahun terakhir realisasi terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal telah melebihi dari target yang direncanakan, dimana pada tahun 2024 rasio capaiannya mencapai 104,17%. Hal ini menunjukan bahwa pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan DPMPTSP semakin baik.

d. Pelaku usaha yang memberikan pelaporan tepat waktu

Pelaku usaha yang memberikan pelaporan tepat waktu dalam program pengendalian pelaksanaan penanaman modal menunjukan realisasi capaian yang lebih tinggi dibandingkan targetnya dimana pada tahun 2024 ditarget hanya 46% namun realisasinya mencapai 100% atau rasio pencapaiannya sebesar 217,39%. Peningkatan ini menunjukan pelaku usaha semakin patuh memberikan LKPM. Namun demikian perhitungan ini perlu dievaluasi kembali apakah sudah mencakup seluruh pelaku usaha yang ada di Kabupaten Pemalang.

e. Realisasi Perizinan

Realisasi perizinan juga penunjukan realisasi yang melebihi targetnya, kecuali pada tahun 2024 dimana realisasi hanya sebesar 89,77% dibawah target 100% yang ditetapkan. Perhitungan ini juga perlu dievaluasi kembali mengingat rasio capaian maksimal seharusnya 100%.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.9.

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Persentase peningkatan jumlah investor				-	**2,95%**	**3,00%**	**3,05%**	**3,10%**	-	**-40%**	**76,19 %**	**5,41%**	**- 25,64 %**	**-**	**- 13,56 %**	**2539 %**	**177,38 %**	**- 827,1 %**
	Persentase terselenggaranya kegiatan pemberian fasilitas /insentif di bidang penanaman modal				-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%
	Persentase terlaksananya kegiatan kajian peta potensi investasi				-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%
	Persentase terlaksananya promosi penanaman modal				-	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	-	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	**-**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Jumlah nilai investasi				-	168.157,332.081	171.520,479.000	176.666,093.000	183.732,737.000	-	171.698.900.267	179.666.691.621	197.152.213.713	220.159.341.867	**-**	102,11 %	104,75 %	111,60 %	119,83 %
	Persentase terselenggarannya pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal				-	**95%**	**95%**	**96%**	**96%**	-	**98,71 %**	**98,58 %**	**99,89 %**	**100%**	**-**	**103,91 %**	**103,77 %**	**104,05 %**	**104,17 %**
	Persentase perizinan yang disetujui				-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	**-**	100%	100%	100%	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu				-	**40%**	**42%**	**44%**	**46%**	-	**85,71 %**	**100%**	**100%**	**100%**	**-**	**214,28 %**	**238,10 %**	**227,27 %**	**217,39 %**
	Persentase terselenggaranya pengendalian pelaksanaan penanaman modal				-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	**-**	100%	100%	100%	100%
	Persentase realisasi perizinan				-	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	-	**160,28 %**	**190,01%**	**156,92 %**	**89,77 %**	**-**	**160,28 %**	**190,01 %**	**156,92 %**	**89,77 %**
	Persentase tersusunnya data/ informasi pelayanan perizinan				-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	**-**	100%	100%	100%	100%

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pemalang, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.1.3.8. Kinerja Keuangan

Rasio penyerapan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang untuk mendanai berbagai macam program dalam kurun waktu 4 tahun terakhir pada umumnya belum mencapai 100%. Rasio penyerapan tertinggi terdapat pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang mencapai 99,86% pada tahun 2024. Sedangkan untuk pertumbuhan anggaran dan realisasinya, tertinggi terdapat pada Program Promosi Penanaman Modal yang mencapai 3.855% untuk anggaran dan 3.852% untuk realisasinya. Kenaikan anggaran program ini memiliki dampak positif yang signifikan, terutama dalam upaya meningkatkan investasi melalui promosi penanaman modal.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.10.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

Program	Anggaran Tahun Ke (Rp. 000)					Realisasi Anggaran Tahun Ke (Rp. 000)					Rasio Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	0	5.468.289	5.918.214	5.440.866	5.185.966	0	5.160.223,7	5.700.443	5.293.816	4.831.187	0	94,37	96,32	97,30	93,16	-5%	-6%
Program Pengembangan Iklim penanaman Modal	0	28.461,4	64.575	1.110	9.970	0	26.116,8	60.606,2	1.110	9.306	0	91,76	93,85	100	93,34	-65%	-64%
Program Promosi penanaman Modal	0	7.079,7	254.319,5	270.220	280.030	0	7.070,1	250.405,1	269.143,3	279.408	0	99,86	98,46	99,60	99,78	3855%	3852%
Program pelayanan Penanaman Modal	0	363.391	158.759,2	225.000	109.072	0	360.622,9	157.745,2	222.245	106,588,2	0	99,24	99,36	98,78	97,72	-70%	-70%
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	0	429.367,5	376.321,5	342.570	790.092	0	262.196,7	370.244,9	342.414	788.960.2	0	61,07	98,39	99,95	99,86	84%	201%
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman	0	12.324,5	30.370,7	40.000	31.000	0	12.266,3	30.292,3	39.993,8	30.924	0	99,53	99,74	99,98	99,75	152%	152%

https://jdih.pemalangkab.go.id

Program	Anggaran Tahun Ke (Rp. 000)					Realisasi Anggaran Tahun Ke (Rp. 000)					Rasio Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Modal																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	862.630	0	0	0	0	858.002	0	0	0	0	99,46	0	0	0	0	-	-
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	376.934	0	0	0	0	374.831	0	0	0	0	99,44	0	0	0	0	-	-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	26.100	0	0	0	0	26.100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	-	-
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	192.137	0	0	0	0	189.893	0	0	0	0	98,83	0	0	0	0	-	-
Program pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4.856	0	0	0	0	4.856	0	0	0	0	100	0	0	0	0	-	-
Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	37.383	0	0	0	0	35.568	0	0	0	0	95,14	0	0	0	0	-	-
Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	440.185	0	0	0	0	422.163	0	0	0	0	95,91	0	0	0	0	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Program	Anggaran Tahun Ke (Rp. 000)					Realisasi Anggaran Tahun Ke (Rp. 000)					Rasio Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	560.263	0	0	0	0	554.426	0	0	0	0	98,96	0	0	0	0	-	-
Program penanganan pengaduan dibidang investasi dan perijinan	19.985	0	0	0	0	15.789	0	0	0	0	79	0	0	0	0	-	-

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pemalang, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok sasaran pelayanan DPMPTSP Kabupaten Pemalang adalah masyarakat yang terlibat dalam urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Secara lebih rinci, kelompok sasaran layanan DPMPTSP baik urusan Penanaman Modal maupun Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Perusahaan PMA/PMDN

   Perusahaan-perusahaan ini merupakan target utama DPMPTSP karena mereka membutuhkan layanan perizinan usaha dan izin-izin lainnya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis mereka. DPMPTSP membantu perusahaan PMA dan PMDN dalam proses perizinan yang efisien dan transparan, sehingga mereka dapat lebih mudah berinvestasi dan beroperasi di Kabupaten Pemalang.

b. Instansi dan Lembaga Terkait

   DPMPTSP juga bekerja sama dengan instansi dan lembaga terkait untuk menilai perizinan yang bersifat teknis seperti perizinan bangunan gedung, izin operasinal di bidang kesehatan atau izin-izin lainnya yang memerlukan penilaian teknis.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Permasalahan

Berdasarkan capaian kinerja DPMPTSP, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi DPMPTSP dapat dijelaskan sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.11.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Belum optimalnya peningkatan investasi dan pelayanan perijinan PTSP	Belum optimalnya pengembangan iklim penanaman modal	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal
		Kurangnya kompetensi SDM dalam pengelolaan media informasi digital
	Belum optimalnya pelayanan perizinan	Keterbatasan ruang Mal Pelayanan Publik
		Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi penilaian perizinan teknis
	Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Kurangnya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan penanaman modal
		Keterbatasan sarana mobilitas pengawasan dan pengendalian penanaman modal

2.2.2. Isu Strategis

Penentuan isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam pelayanan DPMPTSP karena dampaknya yang signifikan bagi kelompok sasaran DPMPTSP selama 5 tahun ke depan. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Beberapa kriteria yang digunakan untuk memilih isu strategis, yaitu :

1. Bersifat lintas sektor,
2. Bersifat lintas wilayah
3. Berupa fenomena atau persoalan nyata
4. Berdampak negatif jangka panjang jika tidak diselesaikan

https://jdih.pemalangkab.go.id

5. Berpotensi mengganggu pelaksanaan pelayanan DPMPTSP
6. Dampaknya kumulatif dan berefek ganda
7. Dampaknya lebih luas dari wilayah perencanaan.

Di samping itu, kondisi lingkungan eksternal dan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana diuraikan di atas, merupakan referensi untuk memperkaya perumusan isu strategis. Selanjutnya dengan mendasari pada lingkup tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Pemalang dan melihat permasalahan yang ada serta dengan mempertimbangkan upaya untuk meningkatkan pelayanan penanaman modal maka isu-isu strategis DPMPTSP dapat dijelaskan sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.12.

Isu Strategis DPMPTSP Kabupaten Pemalang

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Tersedianya Mal Pelayanan Publik 2. Tersedianya Peta Potensi Investasi 3. Tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal 4. Adanya kebijakan kemudahan dan insentif penanaman modal	Belum optimalnya pengembangan iklim penanaman modal	1. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang berkontribusi terhadap pendapatan masyarakat	1. Ketidakpastian ekonomi global 2. Ketenagakerjaan 3. Sumberdaya alam 4. Kepastian hukum 5. Kebijakan perang tarif pajak perdagangan dunia	1. Ketenagakerjaan 2. Kawasan Industri/Kawasan Peruntukan Industri 3. Perizinan 4. Kebijakan fiscal dari pemerintah pusat yang menyebabkan investor lari dari indonesia	1. Ketimpangan wilayah 2. Promosi investasi 3. Tingginya harga lahan dan infrastruktur yang belum optimal pada kawasan peruntukan industri	Belum optimalnya peningkatan investasi di Kabupaten Pemalang dan belum optimalnya pelayanan perijinan satu pintu
1. Penanaman modal 2. Perizinan dan non perizinan	Belum optimalnya pelayanan perizinan	1. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang berkontribusi terhadap pendapatan masyarakat	1. Birokrasi 2. Transparansi	1. Efisiensi 2. Transparansi	1. Efisiensi 2. Transparansi	
1. Penanaman modal 2. Perizinan dan non perizinan	Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	1. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang berkontribusi terhadap pendapatan masyarakat	1. Regulasi dan peraturan	1. Pengawasan dan pemantauan 2. Pelaporan	1. Pengawasan dan pemantauan 2. Pelaporan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB 3
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan tindak lanjut dari sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang dalam 5 tahun ke depan. Sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang merupakan tujuan DPMPTSP Kabupaten Pemalang yaitu **"Meningkatnya Investasi di Kabupaten Pemalang"**.

Peningkatan investasi berdampak pada meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi lokal yang mampu menyerap tenaga kerja dengan memberikan kemudahan perijinan. Peningkatan investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena meningkatkan penanaman modal, yang selanjutnya akan meningkatkan produksi barang dan jasa. Investasi yang meningkat akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui rantai nilai produksi. Dan selanjutnya lapangan kerja yang tercipta akan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang selanjutnya akan meningkatkan daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

3.2. Sasaran

Sasaran Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang merupakan hasil penyelenggaraan pembangunan bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu menuju tercapainya tujuan DPMPTSP. Sasaran Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah **"Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal".**

https://jdih.pemalangkab.go.id

Meningkatnya realisasi penanaman modal, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Peningkatan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk stabilitas ekonomi, iklim bisnis yang kondusif dan kebijakan pemerintah yang mendukung investasi seperti deregulasi dan penyederhanaan perizinan, mendorong peningkatan realisasi penanaman modal.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir Renstra
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)		(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Meningkatnya investasi di kabupaten	Meningkatnya realisasi investasi di kabupaten	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	Jumlah investasi tahun n dikurangi jumlah investasi tahun n-1 DIBAGI jumlah investasi tahun n-1 DIKALI 100%	%	11,67	12,00	12,25	12,50	12,75	13,00	13,25	13,00
			Nilai realisasi penanaman modal	Jumlah investasi seluruh perusahaan atau lembaga usaha yang dilaporkan di Kabupaten Pemalang	Rp	220.159.341.867	246.578.462.891	276.784.324.595	311.382.365.170	351.083.616.729	396.724.486.903	449.290.481.418	396.724.486.903

https://jdih.pemalangkab.go.id

3.3. Strategi

Strategi dalam bab ini dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yaitu Terwujudnya Pemalang Bercahahaya, Bersih, Cakap, Handal dan Mulya dan meralisasikan salah satu tujuan daerah yaitu meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi lokal. Dengan demikian strategi ini merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Perumusan strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang didasarkan pada kriteria :

1. Strategi yang realistis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan
2. Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan
3. Mengevaluasi berbagai faktor internal (kekuatan dan kelemahan), eksternal (peluang dan tantangan) dalam upaya merumuskan strategi yang tepat.

Salah satu pendekatan yang dapat dipergunakan sebagai instrumen dalam pemilihan strategi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu adalah melalui analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor internal dan eksternal dengan didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*).

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.2.

Analisis SWOT

ISU STRATEGIS	KEKUATAN (STRENGHT) 1. Pelayanan perizinan terpadu satu pintu 2. Kemudahan pelayanan perizinan melalui sistem online dan tatap muka 3. Ketersediaan Sumberdaya Manusia untuk mendukung operasional pelayanan DPMPTSP	KELEMAHAN (WEAKNESS) 1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal 2. Belum optimalnya operasionalisasi Mal Pelayanan Publik 3. Masih rendahnya kompetensi SDM dalam pengelolaan media informasi digital 4. Kurangnya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan penanaman modal
PELUANG (OPPORTUNITY) 1. Potensi daerah sebagai daya tarik investasi 2. Perkembangan teknologi digital yang mendukung promosi penanaman modal 3. Sinkronisasi dan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam penilaian perizinan teknis	STRATEGI SO 1. Pengembangan iklim penanaman modal	STRATEGI WO 1. Pengembangan Mal Pelayanan Publik 2. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan
TANTANGAN (THREAT) 1. Kesenjangan antara potensi dan peluang investasi yang ditawarkan dengan permintaan investasi yang diminta investor 2. Kurangnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan penanaman modal	STRATEGI ST 1. Pengembangan promosi penanaman modal	STRATEGI WT 1. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dari kelima strategi tersebut selanjutnya dilakukan penahapan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Penahapan pembangunan ini sangat penting karena memungkinkan pengelolaan sumber daya dan waktu secara efisien, mendukung koordinasi antar sektor, dan memastikan pencapaian tujuan pembangunan secara berkelanjutan. Penahapan juga merupakan evaluasi dan penyesuaian rencana pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu secara berkala, sehingga lebih fleksibel terhadap perubahan kondisi internal maupun eksternal.

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penahapan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 dapat disajikan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.
Penahapan Renstra Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penataan sarana dan prasarana penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Pengembangan iklim investasi daerah yang kondusif dan menarik bagi investor	Pengembangan Board Of Investment lintas Perangkat Daerah	Terwujudnya penguatan fondasi transformasi digitalisasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Akselerasi transformasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Penjelasan penahapan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tahap I (Tahun 2026)

Penataan sarana dan prasarana penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan dengan menyusun standar pelayanan berbasis data yang valid dan up to date sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha baik PMA maupun PMDN.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Penataan juga menyangkut pengaturan dan penyusunan fasilitas fisik dan non-fisik yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik.

Tahap II (Tahun 2027)

Pengembangan iklim investasi daerah yang kondusif dan menarik bagi investor melalui perbaikan birokrasi, peningkatan infrastruktur, pemberian insentif, promosi potensi daerah, serta menjaga stabilitas politik dan keamanan

Tahap III (Tahun 2028)

Pengembangan Board Of Investment yang melibatkan Perangkat Daerah lain yang dibentuk untuk mendampingi investor melalui fasilitasi proses investasi, menawarkan insentif dan kemudahan investasi serta memberikan data dan informasi investasi, termasuk penyelesaian permasalahan investasi.

Tahap IV (Tahun 2029)

Penguatan fondasi transformasi digitalisasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan dengan pengembangan digitalisasi teknologi untuk mengoptimalkan pelayanan penanaman modal, pemberian informasi potensi investasi daerah hingga pembinaan dan pemantauan pelaksanaan penanaman modal.

Tahap V (Tahun 2030)

Tahap V tahun 2030 merupakan awal tahun dimulainya Tahap II RPJPD tahun 2030-2034 yaitu dengan dimulainya akselerasi transformasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Akselerasi transformasi ini adalah dengan menjaga momentum peningkatan investasi guna memastikan peningkatan lapangan kerja yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

3.4. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.4.

Arah Kebijakan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	1. Perluasan investasi dengan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP)	**Strategi :** Pengembangan Mal Pelayanan Publik **Arah Kebijakan :** 1. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur MPP 2. Peningkatan kerjasama pengembangan jenis pelayanan MPP antar instansi vertikal maupun horisontal 3. Pembuatan papan investasi	
		1. Peningkatan investasi dengan mempermudah pelayanan perijinan	**Strategi :** Peningkatan kualitas pelayanan perizinan **Arah Kebijakan :** 1. Peningkatan kualitas pelayanan melalui kecepatan, kemudahan, kepastian dan transparansi proses perizinan	
			Strategi : Pengembangan promosi penanaman modal **Arah Kebijakan :** 1. Peningkatan kegiatan temu bisnis untuk membuka peluang investasi skala regional dan nasional 2. Peningkatan kerjasama dengan lembaga promosi investasi luar daerah	
			Strategi : Pengembangan iklim penanaman modal **Arah Kebijakan :** 1. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal Pemutahiran data dan informasi potensi, peluang dan daya dukung investasi	
		1. Peningkatan kualitas Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	**Strategi :** Pengendalian pelaksanaan penanaman modal **Arah Kebijakan :** 1. Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan penanaman modal	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB 4
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

Untuk mendukung pencapaian sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang telah menyusun rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025-2029. Sementara itu program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu pijakan penyusunan Renja DPMPTSP tahun 2030.

Rencana program, kegiatan dan subkegiatan dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Pemalang yang diambil dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan pencapaian tujuan pembangunan bidang urusan penanaman modal dan bidang urusan pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Pemalang..

Program yang ditetapkan merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah merupakan upaya untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib maupun pilihan. Arah program ini mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi pemanfaatan sumber daya DPMPTSP, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

   Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal merupakan upaya untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Arah program ini mencakup pemberian insentif penanaman modal serta pembuatan peta potensi investasi yang menyangkut kebijakan rencana umum penanaman modal dan penyediaan datadan informasi potensi investasi.

3. Program Promosi Penanaman Modal

   Program Promosi Penanaman Modal merupakan upaya penyediaan informasi terpadu, peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta, serta promosi melalui berbagai saluran. Arah program ini adalah untuk menarik investor.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

   Program Pelayanan Penanaman Modal merupakan upaya mempermudah dan menyederhanakan perizinan melalui pemberian insentif penanaman modal, pelayanan penanaman modal berbasis elektronik. Program ini diarahkan untuk memudahkan investor dalam pelayanan perizinan dan menarik minat investasi.

5. Program Pengendalian Penanaman Modal

   Program Pengendalian Penanaman Modal merupakan upaya penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya, memberikan bimbingan teknis dan pengawasan penanaman modal. Program ini diarahkan untuk memastikan investasi berjalan sesuai dengan peraturan, tujuan yang ditetapkan, dan memberikan dampak positif bagi ekonomi dan sosial.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

https://jdih.pemalangkab.go.id

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal merupakan upaya pengumpulan, pemeliharaan, analisis, pengembangan sistem, hingga pelaporan data penanaman modal. Program ini diarahkan untuk nmeningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan data dan sistem informasi di bidang penanaman modal, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, serta memberikan pelayanan publik yang prima.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.1.

Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
	Meningkatkan Investasi di Kabupaten Pemalang				**Persentase peningkatan investasi**		
		Meningkatnya realisasi penanaman modal			**Nilai realisasi penanaman modal**		
			Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah		**- Nilai SAKIP**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	
				Kegiatan perencanaan, penganggaran, laporan kinerja, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**Persentase tersusunnya Perencanaan,Penganggaran,laporan kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
					Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	
					Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
				Kegiatan administrasi keuangan	**Prosentase terlaksananya aktifitas Administrasi Keuangan**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Kegiatan administrasi barang milik daerah	**Prosentase terlaksananya aktifitas administrasi barang milik daerah**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
				Kegiatan administrasi pendapatan Daerah SKPD	**Prosentase terlaksananya aktifitas Administrasi Pendapatan Daerah**	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Pengolahan Data Retribusi Daerah	
				Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	**Prosentase terlaksananya aktifitas Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	**Prosentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	**Prosentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Prosentase terselenggaranya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
				Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	**Prosentase terselenggaranya Pemeliharaan Barang milik daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya nilai realisasi investasi		**Realisasi Total terhadap Target Investasi**	**Program Pengembangan Iklim penanaman Modal**	
				Kegiatan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal	**Persentase terselenggaranya kegiatan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal**	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
					Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
					Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	
				Dokumen Peta Potensi Investasi	**Persentase terlaksananya kegiatan kajian peta potensi Investasi**	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Kegiatan promosi penanaman modal di tingkat regional dan/atau nasional		**Persentase promosi di tingkat regional dan/atau nasional yang dilaksanakan**	**Program Promosi penanaman Modal**	
				Kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang terlaksana	**Persentase terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan		**Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan**	**Program pelayanan Penanaman Modal**	
				Perizinan yang disetujui	**Persentase terlaksananya kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
					Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	
			Kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha		**Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha**	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	
				Kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	**Prosentase terselenggaranya pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Pengawasan Penanaman Modal	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
			Profil investasi sektor unggulan daerah		**Persentase Ketersediaan Profil Investasi Sektor Unggulan Daerah**	**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	
				Kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi	**Persentase tersusunnya Data/ Informasi Pelayanan Perizinan**	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
					Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.2.

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan

Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah**	**- Nilai SAKIP - Nilai IKM**	**- 63,84 - 89,70**	**- 63,86 - 89,85**	**5.359.176.000**	**- 63,88 - 89,90**	**6.634.155.390**	**- 63,90 - 89,95**	**6.634.155.390**	**- 63,92 - 90**	**6.634.155.390**	**- 63,94 - 90,02**	**6.664.155.390**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunnya Perencanaan, Pengangggaran, laporan kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Pengangggaran,laporan kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100**	**100**	**55.744.790**	**100**	**55.744.790**	**100**	**55.744.790**	**100**	**55.744.790**	**100**	**85.744.790**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2.193.960	2 Dokumen	2.193.960	2 Dokumen	2.193.960	2 Dokumen	2.193.960	2 Dokumen	32.193.960
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	2.101.060	1 Dokumen	2.101.060	1 Dokumen	2.101.060	1 Dokumen	2.101.060	1 Dokumen	2.101.060

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.446.000	1 Dokumen	3.446.000	1 Dokumen	3.446.000	1 Dokumen	3.446.000	1 Dokumen	3.446.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.021.060	1 Dokumen	2.021.060	1 Dokumen	2.021.060	1 Dokumen	2.021.060	1 Dokumen	2.021.060
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.115.920	1 Dokumen	4.115.920	1 Dokumen	4.115.920	1 Dokumen	4.115.920	1 Dokumen	4.115.920

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.232.360	1 Laporan	2.232.360	1 Laporan	2.232.360	1 Laporan	2.232.360	1 Laporan	2.232.360
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	39.634.430	4 Laporan	39.634.430	4 Laporan	39.634.430	4 Laporan	39.634.430	4 Laporan	39.634.430
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	0 Data	0	0 Data	0	0 Data	0	0 Data	0	0 Data	0

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Berita Acara	0 Berita Acara	0	0 Berita Acara	0	0 Berita Acara	0	0 Berita Acara	0	0 Berita Acara	0
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0
Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	0 Subtansi	0 Subtansi	0	0 Subtansi	0	0 Subtansi	0	0 Subtansi	0	0 Subtansi	0

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Daerah yang Diampu	Daerah yang Diampu											
Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	0 Berita Acara	0 Berita Acara	0	0 Berita Acara	0	0 Berita Acara	0	0 Berita Acara	0	0 Berita Acara	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya aktifitas Administrasi Keuangan**	**Persentase terlaksananya aktifitas Administrasi Keuangan**	**100**	**100**	**3.988.122.600**	**100**	**3.988.122.600**	**100**	**3.988.122.600**	**100**	**3.988.122.600**	**100**	**3.988.122.600**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang	32 Orang	3.985.522.000	32 Orang	3.985.522.000	32 Orang	3.985.522.000	32 Orang	3.985.522.000	32 Orang	3.985.522.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
		Pelaksanaan Tugas ASN											
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.399.640	1 Laporan	1.399.640	1 Laporan	1.399.640	1 Laporan	1.399.640	1 Laporan	1.399.640
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	1 Dokumen	1.200.960	1 Dokumen	1.200.960	1 Dokumen	1.200.960	1 Dokumen	1.200.960	1 Dokumen	1.200.960
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya aktifitas administrasi barang milik daerah**	**Persentase terlaksananya aktifitas administrasi barang milik daerah**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya aktifitas Administrasi Pendapatan Daerah**	**Persentase terlaksananya aktifitas Administrasi Pendapatan Daerah**	**0**	**0**	**0**	**100**	**10.000.000**	**100**	**10.000.000**	**100**	**10.000.000**	**100**	**10.000.000**
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	0 Laporan	0 Laporan	0	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya aktifitas administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase terlaksananya aktifitas Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**0**	**0**	**0**	**100**	**416.000.000**	**100**	**416.000.000**	**100**	**416.000.000**	**100**	**416.000.000**
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket	0	64 Paket	16.000.000	64 Paket	16.000.000	64 Paket	16.000.000	64 Paket	16.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang	0	64 Orang	200.000.000	64 Orang	200.000.000	64 Orang	200.000.000	64 Orang	200.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	0 Orang	0 Orang	0	64 Orang	200.000.000	64 Orang	200.000.000	64 Orang	200.000.000	64 Orang	200.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
		Perundang-Undangan											
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya aktifitas Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**217.785.370**	**100**	**445.810.000**	**100**	**445.810.000**	**100**	**445.810.000**	**100**	**445.810.000**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	3.010.000	12 Paket	3.010.000	12 Paket	3.010.000	12 Paket	3.010.000	12 Paket	3.010.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0	12 Paket	15.000.000	12 Paket	15.000.000	12 Paket	15.000.000	12 Paket	15.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0	12 Paket	20.000.000	12 Paket	20.000.000	12 Paket	20.000.000	12 Paket	20.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	92.639.600	12 Paket	110.000.000	12 Paket	110.000.000	12 Paket	110.000.000	12 Paket	110.000.000
Penyediaan Barang	Tersedianya Barang Cetakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	12 Paket	12 Paket	10.928.800	12 Paket	12.000.000	12 Paket	12.000.000	12 Paket	12.000.000	12 Paket	12.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Cetakan dan Penggandaan	dan Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan											
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.800.000	12 Dokumen	3.800.000	12 Dokumen	3.800.000	12 Dokumen	3.800.000	12 Dokumen	3.800.000
Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0	12 Paket	10.000.000	12 Paket	10.000.000	12 Paket	10.000.000	12 Paket	10.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	1.175.000	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	2.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114 Laporan	25 Laporan	106.231.970	120 Laporan	250.000.000	120 Laporan	250.000.000	120 Laporan	250.000.000	120 Laporan	250.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	0	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	0 Dokumen	0 Dokumen	0	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Elektronik pada SKPD	Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya aktifitas Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase terlaksanany a Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**100**	**0**	**100**	**685.000. 000**	**100**	**685.000.0 00**	**100**	**685.000.0 00**	**100**	**685.000. 000**
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	1 Unit	280.000. 000	1 Unit	280.000.0 00	1 Unit	280.000.0 00	1 Unit	280.000. 000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	1 Unit	280.000. 000	1 Unit	280.000.0 00	1 Unit	280.000.0 00	1 Unit	280.000. 000
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0	1 Paket	25.000.0 00	1 Paket	25.000.00 0	1 Paket	25.000.00 0	1 Paket	25.000.0 00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	0	10	100.000. 000	10	100.000.0 00	10	100.000.0 00	10	100.000. 000

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya aktifitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terselenggaranya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**100**	**745.070.500**	**100**	**748.478.000**	**100**	**748.478.000**	**100**	**748.478.000**	**100**	**748.478.000**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	2.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	196.592.500	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	546.478.000	12 Laporan	546.478.000	12 Laporan	546.478.000	12 Laporan	546.478.000	12 Laporan	546.478.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya aktifitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terselenggaranya Pemeliharaan Barang milik daerah**	**100**	**100**	**352.452.740**	**100**	**285.000.000**	**100**	**285.000.000**	**100**	**285.000.000**	**100**	**285.000.000**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	29 Unit	68.782.740	29 Unit	100.000.000	29 Unit	100.000.000	29 Unit	100.000.000	29 Unit	100.000.000
Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	0	10 Unit	25.000.000	10 Unit	25.000.000	10 Unit	25.000.000	10 Unit	25.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	58.670.000	25 Unit	60.000.000	25 Unit	60.000.000	25 Unit	60.000.000	25 Unit	60.000.000
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	225.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0
Program Pengembangan Iklim penanaman Modal	**Meningkatnya iklim penanaman modal**	**Realisasi Total terhadap Target Investasi**	**107,37**	**100**	**67.040.700**	**100**	**225.000.000**	**100**	**225.000.000**	**100**	**225.000.000**	**100**	**225.000.000**
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya aktifitas Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terselenggaranya kegiatan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal**	**100**	**100**	**4.188.300**	**100**	**75.000.000**	**100**	**75.000.000**	**100**	**75.000.000**	**100**	**75.000.000**
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	4.188.300	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000
Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Ditetapkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	**Terlaksananya aktifitas Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya kegiatan kajian peta otensi Investasi**	**100**	**100**	**62.852.400**	**100**	**150.000.000**	**100**	**150.000.000**	**100**	**150.000.000**	**100**	**150.000.000**
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	62.852.400	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	0 Daerah	0 Daerah	0	0 Daerah	0	0 Daerah	0	0 Daerah	0	0 Daerah	0
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000
Program Promosi penanaman Modal	**Meningkatnya promosi penanaman modal**	**Persentase promosi di tingkat regional dan/atau nasional yang dilaksanakan**	**100**	**100**	**204.629.700**	**100**	**300.000.000**	**100**	**300.000.000**	**100**	**300.000.000**	**100**	**300.000.000**
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya aktifitas Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal**	**100**	**100**	**204.629.700**	**100**	**300.000.000**	**100**	**300.000.000**	**100**	**300.000.000**	**100**	**300.000.000**
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal	2 Dokumen	1 Dokumen	104.629.700	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
		Kabupaten/Kota											
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	100.000.000
Program pelayanan Penanaman Modal	**Meningkatnya pelayanan penanaman modal**	**Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan**	**100**	**100**	**75.000.000**	**100**	**102.000.000**	**100**	**130.000.000**	**100**	**155.000.000**	**100**	**180.000.000**
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksanaya aktifitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**100**	**75.000.000**	**100**	**102.000.000**	**100**	**130.000.000**	**100**	**155.000.000**	**100**	**180.000.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	13.465 Pelaku Usaha	4.000 Pelaku Usaha	55.000.000	4.500 Pelaku Usaha	75.000.000	5.000 Pelaku Usaha	100.000.000	5.500 Pelaku Usaha	125.000.000	6.000 Pelaku Usaha	150.000.000
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi	8 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	5.000.000	5 Pelaku Usaha	7.000.000	5 Pelaku Usaha	10.000.000	5 Pelaku Usaha	10.000.000	5 Pelaku Usaha	10.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	secara Elektronik	secara Elektronik											
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	72 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	15.000.000	50 Kegiatan Usaha	20.000.000	50 Kegiatan Usaha	20.000.000	50 Kegiatan Usaha	20.000.000	50 Kegiatan Usaha	20.000.000
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	**Meningkatnya pengendalian penanaman modal**	**Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha**	**83,33**	**100**	**62.430.000**	**100**	**357.000.000**	**100**	**357.000.000**	**100**	**357.000.000**	**100**	**357.000.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya aktifitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase terselenggaranya pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**100**	**100**	**62.430.000**	**100**	**357.000.000**	**100**	**357.000.000**	**100**	**357.000.000**	**100**	**357.000.000**
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	2.430.000	12 Kegiatan Usaha	87.000.000	12 Kegiatan Usaha	87.000.000	12 Kegiatan Usaha	87.000.000	12 Kegiatan Usaha	87.000.000
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	367 Pelaku Usaha	319 Pelaku Usaha	5.000.000	100 Pelaku Usaha	100.000.000	100 Pelaku Usaha	100.000.000	100 Pelaku Usaha	100.000.000	100 Pelaku Usaha	100.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	20 Kegiatan Usaha	20 Kegiatan Usaha	55.000.000	60 Kegiatan Usaha	170.000.000	60 Kegiatan Usaha	170.000.000	60 Kegiatan Usaha	170.000.000	60 Kegiatan Usaha	170.000.000
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	**Tersedianya profil investasi daerah**	**Persentase Ketersediaan Profil Investasi Sektor Unggulan Daerah**	**100**	**100**	**25.000.000**	**100**	**35.000.000**	**100**	**35.000.000**	**100**	**35.000.000**	**100**	**35.000.000**
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah	**Terlaksananya aktifitas Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat**	**Persentase tersusunnya Data/ Informasi Pelayanan Perizinan**	**100**	**100**	**25.000.000**	**100**	**35.000.000**	**100**	**35.000.000**	**100**	**35.000.000**	**100**	**35.000.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Uraian Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Kabupaten/Kota	**Daerah Kabupaten/Kota**												
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000
TOTAL ANGGARAN					**5.793.276.400**		**7.653.155.390**		**7.681.155.390**		**7.706.155.390**		**7.761.155.390**

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.2. URAIAN SUBKEGIATAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Uraian subkegiatan dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah sangat penting untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Subkegiatan prioritas harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi pedoman pembangunan daerah dan dapat diterjemahkan menjadi aksi-aksi nyata yang dapat diimplementasikan oleh DPMPTSP Kabupaten Pemalang. Subkegiatan harus dirancang dan dilaksanakan secara detail, dengan mempertimbangkan sumber daya, waktu, dan target capaian yang jelas.

Tabel 4.3.
Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	**Program Pengembangan Iklim penanaman Modal**	**Meningkatnya nilai realisasi investasi**	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	
			Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
			Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	
			Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
2	**Program Promosi Penanaman Modal**	**Kegiatan promosi penanaman modal di tingkat regional dan/atau nasional**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
3	**Program pelayanan Penanaman Modal**	**Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan**	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
			Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
			Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	
4	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha**	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	
			Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
			Pengawasan Penanaman Modal	
5	**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Profil investasi sektor unggulan daerah**	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	

4.3. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DPMPTSP KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja utama DPMPTSP Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta menjadikan IKU tersebut sebagai prioritas utama.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.4.

Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kabupaten Pemalang

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	%	12,00	12,25	12,50	12,75	13,00	13,25	
2	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Rp	246.578.462.891	276.784.324.595	311.382.365.170	351.083.616.729	396.724.486.903	449.290.481.418	
3	Indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh	Indeks	89,80	89,85	89,90	89,95	90,00	90,02	

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.4. TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis DPMPTSP Kabupaten Pemalang. IKK membantu mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan, sehingga dapat digunakan untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi efektivitas suatu program atau kegiatan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.5.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPMPTSP Kabupaten Pemalang

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	%	12,00	12,25	12,50	12,75	13,00	13,25	

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.5. INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Daerah (IKD) berfungsi sebagai alat ukur untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu., serta untuk mengetahui apakah tujuan pembangunan daerah telah tercapai.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.6.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) DPMPTSP Kabupaten Pemalang

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	%	12,00	12,25	12,50	12,75	13,00	13,25	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB 5
PENUTUP

5.1. KESIMPULAN PENTING SUBSTANSIAL

Kesimpulan penting substansial Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 telah mengadopsi upaya dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran visi “Pemalang Bercahaya” dan misi “RHAPSODI” pembangunan Kabupaten Pemalang dalam lima tahun ke depan.
2. Tujuan Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 berdasarkan target-target yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan adalah meningkatnya investasi di Kabupaten Pemalang dengan sasaran meningkatnya realisasi penanaman modal.
3. Strategi, Kebijakan dan Program dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yaitu Terwujudnya Pemalang Bercahahaya, Bersih, Cakap, Handal dan Mulya dan meralisasikan salah satu tujuan daerah yaitu meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi lokal.
4. Kegiatan dan Subkegiatan dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan rincian aktivitas-aktivitas konkret yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan DPMPTSP Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id

5.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang tahun 2026 sampai dengan tahun 2029.

5.3. PELAKSANAAN PENGENDALIAN EVALUASI

Pelaksanaan pengendalian evaluasi Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 bertujuan untuk memastikan pencapaian target program dan kegiatan, menilai kinerja serta mengendalikan risiko strategis DPMPTSP Kabupaten Pemalang. Pengendalian memastikan bahwa program dan kegiatan sesuai dengan rencana, sedangkan evaluasi menilai pencapaian target dan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Dalam pelaksanaan pengendalian dilakukan minimal 1 (satu) kali selama periode 5 tahun (Periode Renstra).

5.4. TAHUN TRANSISI

Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 ini juga menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang pada tahun 2030 sebagai tahun transisi dimana pada tahun tersebut belum disusunnya RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2030-2034.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah). Dalam undang-undang ini juga menetapkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah didefinisikan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahun) yang disusun oleh setiap perangkat daerah (OPD) untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Di mana dalam proses penyusunannya dilakukan bersama-sama dengan tahap perumusan rancangan akhir RPJMD. Sehingga strategi dan arah kebijakan yang dimuat dalam Renstra ini sejalan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari kinerja yang ingin diwujudkan selama tahun 2025-2029 dan untuk menggambarkan kebermanfaatannya berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang.

Secara substansi Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan ini mengacu kepada arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025 – 2029, Renstra Kementrian Koperasi dan UKM dan berbagai dokumen perencanaan lainnya yang relevan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai sinergisitas dan keselarasan

https://jdih.pemalangkab.go.id

antara dokumen perencanaan pembangunan (baik jangka panjang, menengah dan tahunan) antara berbagai level pemerintahan. Sejalan dengan hal tersebut, Rentra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tahun 2025–2029 diharapkan dapat menjadi dokumen perencanaan publik yang *akuntabel, realible dan implementatif.*

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
d. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Menjelaskan kriteria, pengembangan, pembinaan, dan pendanaan UMKM);
e. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Mengatur sistem distribusi, perlindungan konsumen, ekspor-impor, perdagangan dalam negeri, dan e-commerce);
f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

https://jdih.pemalangkab.go.id

g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
h. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
j. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;
k. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
l. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
m. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
n. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang: Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Perdagangan;
q. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman

https://jdih.pemalangkab.go.id

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029:

r. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
s. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
t. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2050 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 9);
u. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang; (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 13);
v. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 7);
w. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025 – 2029;
x. Peraturan Bupati Nomor : 140 Tahun 2016 (ditetapkan 23 Desember 2016, berlaku 1 Januari 2017): menetapkan pembentukan UPT Pasar sebagai unit teknis operasional di bawah Diskoperindag Pemalang;
y. Peraturan Bupati Nomor : 74 Tahun 2018 (ditetapkan 21 Desember 2018, berlaku 1 Januari 2019): mempertegas kembali tugas, fungsi, dan struktur organisasi UPT Pasar;
z. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra ini adalah sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah sebagai :

a. Pedoman kerja Unsur/Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya termasuk dalam pencapaan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang;
b. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
c. Dasar monitoring dan evaluasi dan monitoring kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

1.1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Perdagangan Kabupaten Pemalang.

1.2. Landasan Hukum

Mengidentifikasikan dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 serta disusun sesuai kaidah penyusunan produk hukum.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Menyajikan tugas, fungsi dan struktur Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang

2.1.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

Menyajikan data-data dan informasi sumberdaya

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang yang meliputi sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menyajikan data-data dan informasi pelayanan yang menjadi urusan dan tanggung jawab Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Mengidentifikasikan masyarakat yang terlibat dalam urusan pemerintahan bidang Koperasi, UMKM, dan Perdagangan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Mengidentifikasikan permasalahan dan isu strategis yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025- 2029 yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang.

2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah

Mengidentifikasikan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang.

2.2.2. Isu Strategis

Mengidentifikasikan isu strategis sesuai lingkungan dinamis yang dapat mempengaruhi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang baik secara langsung maupun tidak langsung.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menyajikan tujuan, sasaran dan arah kebijakan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Menentukan tujuan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang berdasarkan NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Menentukan sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang berdasarkan NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

3.3. Strategi Perangkat Daerah

Menentukan strategi Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang berisi tindakan yang komprehensif yang akan dilakukan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang.

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Menyajikan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menyajikan program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan koperasi, UMKM dan perdagangan.

4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

https://jdih.pemalangkab.go.id

Menyajikan program, kegiatan dan subkegiatan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output.

4.2. Uraian Subkegiatan Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Menyajikan uraian subkegiatan prioritas yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi pedoman pembangunan daerah dan dapat diterjemahkan menjadi aksi-aksi nyata yang dapat diimplementasikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang.

4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra

Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Menyajikan indikator kinerja utama atau IKU Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta menjadikan IKU tersebut sebagai prioritas utama.

4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Menyajikan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang digunaka untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang.

BAB V. PENUTUP

Menyajikan kesimpulan penting subtansial, kaidah pelaksanaan serta pelaksanaan pengendalian evaluasi.

5.1. Kesimpulan Penting Subtansial

Menyajikan kesimpulan penting substansial Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

https://jdih.pemalangkab.go.id

5.2. Kaidah Pelaksanaan dan Masa Transisi

Menyajikan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pemalang Tahun 2025-2029 dan pedoman penyusunan Renja pada tahun 2030 sebagai tahun transisi, untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta mengisi kekosongan Renja setelah Renstra berakhir

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang mempunyai tugas: membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, bidang usaha kecil, dan menengah dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- perumusan kebijakan di bidang koperasi, bidang usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro, bidang perdagangan, serta bidang perindustrian;
- pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, bidang usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro, bidang perdagangan, serta bidang perindustrian;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, bidang usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro, bidang perdagangan, serta bidang perindustrian;
- pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang, sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang

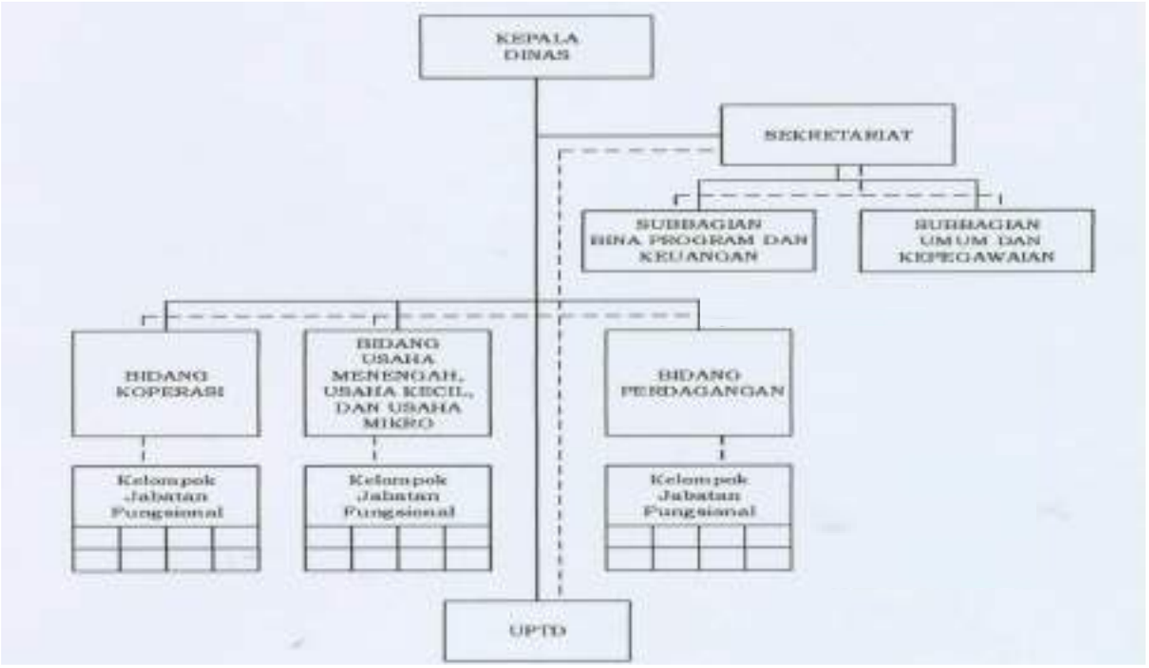

Penjelasan Bagan Struktur Organisasi:

1) ***Kepala Dinas*** Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang membawahi langsung:

2) ***Sekretariat***, membawakan:

a) Subbagian Bina Program dan Keuangan;

b) Subbagian Umum dan Kepegawaian;

3) ***Bidang Koperasi***;

4) ***Bidang Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro***;

5) ***Bidang Perdagangan***;

6) ***Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)*** sebanyak 6 yaitu :

a) *Unit Pengelola Pasar Pemalang*;

1) Sub UP Pasar Sayur dan Buah;

2) Sub UP Pasar Pelutan;

3) Sub UP Pasar Bojongbata

4) Sub UP Pasar Paduraksa;

b) *Unit Pengelola Pasar Comal*;

1) Sub UP Pasar Ulujami;

c) *Unit Pengelola Pasar Petarukan*;

1) Sub UP Pasar Beji;;

2) Sub UP Pasar Banjardawa;

https://jdih.pemalangkab.go.id

d) *Unit Pengelola Pasar Randudongkal*;

1) Sub UP Pasar Bantarbolang;

2) Sub UP Pasar Hewan Randudongkal;

e) *Unit Pengelola Pasar Moga Kelas B*;

1) Sub UP Pasar Warungpring;

f) *Unit Pengelola Pasar Belik Kelas B*;

7) *Kelompok Jabatan Fungsional*.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan tersebut di atas, sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

a) Tugas dan Fungsi

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

(1) perumusan kebijakan di bidang koperasi, bidang usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro, bidang perdagangan;

(2) pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, bidang usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro, bidang perdagangan;

(3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, bidang usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro, bidang perdagangan;

(4) pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan;

(5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

b) Uraian Tugas

Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

(1) Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintah bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah serta bidang perdagangan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

https://jdih.pemalangkab.go.id

(2) Merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Renstra dan Renja;
(3) Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintah bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan bidang perdagangan;
(4) Mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan bidang perdagangan;
(5) Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerintah bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan bidang perdagangan;
(6) Mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintah bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan bidang perdagangan sesuai unsur SPIP;
(7) Mengarahkan pengelolaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan, DPA bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan bidang perdagangan;
(8) Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintah bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan bidang perdagangan;
(9) Merumuskan inovasi daerah urusan pemerintah bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan bidang perdagangan;
(10) Merumuskan laporan di bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan bidang perdagangan;
(11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sekretaris

a) Tugas dan Fungsi

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

(1) Persiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
(2) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

kegiatan di lingkungan Dinas;

(3) Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakan, kearsipan dilingkungan Dinas;

(4) Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;

(5) Penyiapan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;

(6) Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;

(7) Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan

(8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) <u>Uraian Tugas</u>

Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

(1) Merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan;

(2) Mengoordinasikan usulan Renstra, Renja, RKA dan DPA;

(3) Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan;

(4) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengelolaan dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kedinasan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggan, barang milik daerah, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dokumentasi dan pengadaan barang/jasa;

(5) Menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian;

(6) Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik;

(7) Menyelenggarakan SPIP urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Bidang Perdagangan sesuai unsur SPIP;

(8) Menyusun konsep inovasi kesekretariatan;

(9) mengoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang-bidang;

(10) Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

https://jdih.pemalangkab.go.id

kesekretariatan;

(11) Mengoordinasikan penyusunan laporan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah serta bidang perdagangan;

(12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Kepala Bidang Koperasi

a) Tugas dan Fungsi

Kepala Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi:

(1) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi; dan

(2) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Uraian Tugas

Kepala Bidang Koperasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

(1) Merencanakan program dan kegiatan Bidang Koperasi sesuai dengan dokumen perencanaan;

(2) menyusun rancangan kebijakan Bidang Koperasi;

(3) Merumuskan kebijakan teknis di Bidang Koperasi;

(4) Menyelenggarakan pelayanan izin usaha simpan pinjam yang meliputi rekomendasi izin usaha simpan pinjam, pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi serta rekomendasi kepada Gubernur dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terkait izin pembukaan kantor cabang bagi koperasi tingkat provinsi dan nasional.

(5) Menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang meliputi pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan Daerah serta pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan Daerah.

(6) Menyelenggarakan penilaian kesehatan Koperasi Simpan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang meliputi pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan Daerah serta penghargaan kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan Daerah;

(7) Menyelenggarakan pendidikan dan latihan perkoperasian melalui peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi;

(8) Menyelenggarakan pemberdayaan dan perlindungan koperasi melalui pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan.;

(9) Menyusun konsep inovasi pada Bidang Koperasi;

(10) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Koperasi;

(11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Koperasi;

(12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Koperasi;

(13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Kepala Bidang Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro

a) Tugas dan Fungsi

Kepala Bidang Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:

(1) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro; dan

(2) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Uraian Tugas

Kepala Bidang Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

(1) Merencanakan program dan kegiatan Bidang Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro sesuai dengan dokumen perencanaan;
(2) Menyusun rancangan kebijakan Bidang Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro;
(3) Merumuskan kebijakan teknis di bidang usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro.
(4) Menyelenggarakan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) yang meliputi pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro, pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro, fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro, pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro, serta koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro;
(5) Menyelenggarakan pengembangan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) melalui fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, sdm, serta desain dan teknologi;
(6) Menyusun konsep inovasi pada Bidang Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro;
(7) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro;
(8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro;
(9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro;
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. Kepala Bidang Perdagangan

a) Tugas dan Fungsi

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan;

https://jdih.pemalangkab.go.id

dan;

(2) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Uraian Tugas

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

(1) Merencanakan program dan kegiatan Bidang Perdagangan sesuai dengan dokumen perencanaan;

(2) Menyusun rancangan kebijakan Bidang Perdagangan;

(3) Merumuskan kebijakan teknis di Bidang Perdagangan.

(4) Menyelenggarakan fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan yang meliputi rekomendasi fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang; fasilitasi perizinan surat tanda pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) dalam negeri terintegrasi secara elektronik, fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan surat tanda pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) dalam negeri serta pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya terhadap pengguna akhir bahan berbahaya (PA-B2) maupun produsen B2 (P-B2).

(5) Menyelenggarakan peningkatan sarana distribusi perdagangan yang meliputi penyediaan sarana distribusi perdagangan, fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan, pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan serta pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan.

(6) Menyelenggarakan stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang meliputi menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah melalui koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat, koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat, pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen

https://jdih.pemalangkab.go.id

dan pasar rakyat; pengendalian harga dan stok barang melalui pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang; pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam daerah serta pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi;

(7) Menyelenggarakan pengembangan ekspor yang meliputi pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan Daerah, pameran dagang nasional, pameran dagang lokal serta pembinaan pelaku usaha ekspor;

(8) Menyelenggarakan metrologi legal berupa Tera, Tera Ulang dan pengawasan/penyuluhan metrologi legal;

(9) Menyusun konsep inovasi pada Bidang Perdagangan;

(10) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Perdagangan;

(11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Perdagangan;

(12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Perdagangan;

(13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebanyak 6 yaitu :

(1) Unit Pengelola Pasar Pemalang.

1) Sub UP Pasar Sayur dan Buah;

2) Sub UP Pasar Pelutan;

3) Sub Up Pasar Bojongbata;

4) Sub Up Pasar Paduraksa;

(2) Unit Pengelola Pasar Comal.

1) Sub Up Pasar Ulujami;

(3) Unit Pengelola Pasar Petarukan.

1) Sub Up Pasar Beji;

2) Sub Up Pasar Banjardawa;

(4) Unit Pengelola Pasar Randudongkal.

1) Sub Up Pasar Bantarbolang;

2) Sub Up Pasar Hewan Randudongkal;

(5) Unit Pengelola Pasar Moga Kelas B.

1) Sub Up Pasar Warungpring;

(6) Unit Pengelola Pasar Belik Kelas B.

https://jdih.pemalangkab.go.id

a) Tugas dan Fungsi UPT

Tugas UPT Pasar:

(1) Melaksanakan tugas teknis operasional pengelolaan pasar, seperti:
- Menyusun rencana dan menerapkan standar operasional pasar;
- Mengorganisir kegiatan harian pasar;
- Mengelola penempatan, izin kios/los, dan fasilitas pasar.

(2) Melakukan koordinasi lintas instansi, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, dan pihak terkait lainnya.

Fungsi UPT Pasar:

Perbup 74/2018 mengklasifikasikan fungsi UPT Pasar sebagai berikut :

(1) Pengelolaan dan Operasional Pasar
- Menata pedagang, zonasi pasar, dan jam operasional;
- Menyediakan fasilitas umum dan layanan pasar;

(2) Pemeliharaan Infrastruktur Pasar
- Menjaga kebersihan, sanitasi, drainase, dan kondisi bangunan pasar;

(3) Pengawasan dan Penertiban
- Mengawasi kepatuhan pedagang terhadap peraturan daerah;
- Menertibkan pedagang liar yang mengganggu area pasar;

(4) Administrasi dan Retribusi
- Mengelola izin kios/los, pendaftaran pedagang, dan pengumpulan retribusi pasar;
- Mengelola pencatatan keuangan dan menyusun laporan pendapatan;

(5) Pelayanan Pengaduan dan Mediasi
- Menyediakan layanan pengaduan dan menyelesaikan konflik di antara pedagang;

(6) Pelaporan
- Menyusun laporan kegiatan dan evaluasi secara berkala kepada Dinas.

https://jdih.pemalangkab.go.id

B. Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang memiliki sumber daya sebagai berikut :

1) Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai pada tahun 2025 pasca penetapan peraturan daerah SOTK sebanyak 168 orang dengan rincian sebagai berikut :

a) Perincian Berdasarkan Golongan

Gambaran pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang berdasarkan golongan sebagaimana Tabel 2.1

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	IV/d			0
2	IV/c	1		1
3	IV/b		1	1
4	IV/a	2	1	3
5	III/d	7		7
6	III/c	8		8
7	III/b	12		12
8	III/a	15	13	28
9	II/d	29	10	39
10	II/c	17	15	32
11	II/b	8		8
12	II/a	23		23
13	I/d	6		6
Total Jumlah		128	40	168

Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025

b) Perincian Berdasarkan Pendidikan

Gambaran pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana Tabel 2.2 diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SD dan tertinggi adalah Doktor (S2), sebagian besar berpendidikan SLTA (45,18 %).

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Jumlah
1.	Sekolah Dasar (SD)	17		17
2.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	32		32
3.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	58	19	77
4.	Diploma Tiga (D3)	5		5
5.	Strata Satu (S1)	14	12	26
6.	Strata Dua (S2)	9	2	11
Jumlah		135	33	168

Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025

c) *Perincian Berdasarkan Diklat*

Gambaran pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dalam Tabel 2.3.

(1) Diklat Kepemimpinan

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Kepemimpinan

No.	Jabatan	Dikat PIM				Total
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Dinas			1		1
2.	Sekretaris Dinas			1		1
2.	Kepala Bagian/Bidang			3		3
3.	Kepala UPT				1	1
4.	Kepala Sub Bagian/Bidang				1	1
	Jumlah Total			5	2	7

Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025

d) *Perincian Berdasarkan Umur*

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur

No.	Komposisi Menurut Umur	Jumlah
1.	Umur 20 – 30 Tahun	37
2.	Umur 31 – 40 Tahun	50
3.	Umur 41 – 50 Tahun	56
4.	Umur 51 Tahun ke atas	25

Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

e) *Perincian Berdasarkan Gender*

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender

No.	Gender	Jumlah
1.	Laki-laki	128
2.	Perempuan	40
	Jumlah	168

Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025

2) *Sarana dan Prasarana*

Untuk menjalankan operasional tugas pokok dan fungsi, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang memiliki sarana dan prasarana yang masih berfungsi secara baik sebagaimana dalam Tabel 2.6 dan Tabel 2.7 di bawah ini :

Tabel 2.6
Data Aset Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2024

NO.	JENIS ASET TETAP	TAHUN 2024 (Rp)
1.	TANAH	65.099.950.200
2.	PERALATAN MESIN	9.286.642.779
3.	GEDUNG DAN BANGUNAN	235.982.560.411
4.	JALAN, IRIGASI DAN BANGUNAN	2.104.507.329
5.	ASET TETAP LAINNYA	17.952.200
6.	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	1.383.825.800

Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025

Tabel 2.7
Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	SATUAN	KONDISI		JUMLAH
			BAIK	RUSAK	
1	TANAH	unit	29	-	29
2	GEDUNG DAN BANGUNAN	m2	341	11	355
3	JARINGAN IRIGASI DAN JALAN	m2	21	-	21
4	PERALATAN DAN MESIN			-	
1)	Escalator	unit	1	-	1
2)	Portable Generating Set	unit	1	-	1
3)	Stationary Generating Set	unit	2	-	2
4)	Portable Water Pump	unit	1	-	1
5)	Pompa Air	unit	1	2	3
6)	Station Wagon	unit	6	-	6
7)	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	unit	1	-	1
8)	Kendaraan bermotor angkutan barang lainnya	unit	5	-	5

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	SATUAN	KONDISI		JUMLAH
			BAIK	RUSAK	
9)	Sepeda Motor	unit	51	3	54
10)	Kendaraan bermotor beroda dua lainnya	unit	2	-	2
11)	Sepeda	unit	-	1	1
12)	Gerobak Tarik	unit	40	10	50
13)	Gerobak Dorong	unit	150	33	183
14)	Baggage Trolly	unit	-	4	4
15)	Kendaraan tak bermotor angkutan barang lainnya (dst)	unit	13	4	17
16)	Bangku Tunggu	unit	4	2	6
17)	Mesin Kompresor	unit	1	-	1
18)	Perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	unit	5	-	5
19)	Perkakas bengkel konstruksi logam lainnya (dst)	unit	11	-	11
20)	PH Meter (Alat Ukur Universal)	unit	1	-	1
21)	Stopwatch	unit	1	-	1
22)	Stelan Instrumen Bourje	unit	1	-	1
23)	Tool Set	unit	1	-	1
24)	Landasan Cap Lengkap	unit	1	-	1
25)	Tang Plombir / Segel	unit	1	-	1
26)	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	unit	3	-	3
27)	Timbangan Meja Capasitas 10 Kg	unit	-	23	23
28)	Timbangan Meja Capasitas 5 Kg	unit	21	-	21
29)	Timbangan Sentisimal Dacin Kuningan	unit	3	-	3
30)	Neraca Tera E	unit	1	-	1
31	Anak Timbangan Miligram	unit	1	-	1
32	Anak Timbangan Bidur	unit	1	-	1
33	Anak Timbangan Dari Besi	unit	3	-	3
34	Lemari Besi/Metal	unit	15	10	25
35	Lemari Kayu	unit	50	7	57
36	Rak Besi	unit	18	-	18
37	Rak Kayu	unit	4	2	6
38	Filing Cabinet Besi	unit	61	11	72
39	Brandkas	unit	-	10	10
40	Lemari Kaca	unit	5	7	12
41	Lemari Makan	unit	3	-	3
42	CCTV - Camera Control Television System	unit	30	3	33
43	Papan Visual/Papan Nama	unit	7	1	8
44	White Board	unit	-	6	6
45	Alat Penghancur Kertas	unit	-	1	1
46	Mesin Absensi	unit	2	-	2
47	Display	unit	1	-	1
48	Papan Gambar	unit	1	-	1
49	Papan Nama Instansi	unit	13	-	13
50	Papan Pengumuman	unit	18	10	28
51	Alat Kantor Lainnya	unit	55	12	67
52	Meja Kerja Besi/Metal	unit	1	-	1

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	SATUAN	KONDISI		JUMLAH
			BAIK	RUSAK	
53	Meja Kerja Kayu	unit	100	13	113
54	Kursi Besi/Metal	unit	27	-	27
55	Kursi Kayu	unit	102	33	135
56	Sice	unit	-	7	7
57	Tempat Tidur Besi	unit	2	-	2
58	Tempat Tidur Kayu	unit	-	2	2
59	Meja Tambahan	unit	-	1	1
60	Meja Panjang	unit	-	1	1
61	Meja 1/2 Biro	unit	20	21	41
62	Meja Makan Besi	unit	-	1	1
63	Meja Makan Kayu	unit	-	15	15
64	Kursi Rapat	unit	201	72	273
65	Kursi Tamu	unit	9	6	15
66	Kursi Putar	unit	15	13	28
67	Meja Komputer	unit	2	15	17
68	Sofa	unit	1	-	1
69	Meubeleur lainnya	unit	-	1	1
70	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	unit	1	-	1
71	Mesin Pemotong Rumput	unit	3	-	3
72	Lemari Es	unit	1	1	2
73	A.C. Window	unit	20	5	25
74	A.C. Split	unit	8	3	11
75	Kipas Angin	unit	25	7	32
76	Kompor Listrik (Alat Dapur)	unit	-	20	20
77	Kompor Gas (Alat Dapur)	unit	2	-	2
78	Tabung Gas	unit	3	-	3
79	Alat Dapur lainnya	unit	2	-	2
80	Televisi	unit	5	3	8
81	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	unit	-	1	1
82	Amplifier	unit	-	11	11
83	Loudspeaker	unit	3	19	22
84	Sound System	unit	1	2	3
85	Compact Disc	unit	-	2	2
86	Wireless	unit	1	-	1
87	Megaphone	unit	-	20	20
88	Microphone	unit	-	6	6
89	Unit Power Supply	unit	2	17	19
90	Camera Video	unit	1	10	11
91	Camera film	unit	-	2	2
92	Tustel	unit	1	-	1
93	Tangga Aluminium	unit	1	-	1
94	Dispenser	unit	7	6	13
95	Mimbar/Podium	unit	-	1	1
96	Handy Cam	unit	-	2	2
97	Alat Rumah Tangga Lain-lain	unit	31	1	32
98	Alat Pembantu Kebakaran	unit	77	-	77

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	SATUAN	KONDISI		JUMLAH
			BAIK	RUSAK	
99	Microphone Floor Stand	unit	1	-	1
100	Meja Kerja Pejabat Eselon II	unit	1	-	1
101	Meja Kerja Pejabat Eselon III	unit	8	-	8
102	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	unit	17	-	17
103	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	unit	87	-	87
104	Meja Kerja Pejabat lain-lain	unit	10	-	10
105	Meja Tamu Biasa	unit	1	-	1
106	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	unit	2	-	2
107	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	unit	7	-	7
108	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	unit	11	9	20
109	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	unit	87	16	103
110	Kursi Kerja Pejabat lainnya	unit	10	-	10
111	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	unit	1	-	1
112	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	unit	6	-	6
113	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	unit	6	-	6
114	Rice cooker	unit	-	1	1
115	Microphone/Wireless MIC	unit	-	2	2
116	Uninterruptible Power Supply (UPS)	unit	-	1	1
117	peralatan studio audio lainnya (dst)	unit	1	2	3
118	Camera Electronic	unit	-	3	3
119	Rak Peralatan	unit	1	-	1
120	Layar Film/Projector	unit	-	2	2
121	Camera Digital	unit	-	1	1
122	Mesin Pemotong Biasa	unit	1	-	1
123	Rak Peralatan	unit	1	-	1
124	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	unit	-	6	6
125	Telephone (PABX)	unit	-	2	2
126	Pesawat Telephone	unit	-	8	8
127	Handy Talky (HT)	unit	-	19	19
128	Facsimile	unit	-	5	5
129	Jam Mekanis	unit	-	4	4
130	Peralatan pemancar vhf/fm lainnya (dst)	unit	-	1	1
131	Dehumidifier (Humidity Control)	unit	-	1	1
132	Thermometer Oral, Air Raksa	unit	-	1	1
133	Unit Tranceiver Ssb Portable	unit	-	2	2
134	Timbangan Elektronik	unit	3	-	3
135	Concrette Hammer Set	unit	1	-	1
136	Thermohygrometer (Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik)	unit	1	-	1
137	Alat Uji Tekan Hidrostatic Impact Test	unit	5	-	5
138	Anak Timbangan	unit	9	-	9
139	Papan Bergerak	unit	1	-	1
140	Gelas Ukur	unit	1	-	1
141	Barometer (Meteorological Equipment)	unit	1	-	1
142	Multi Tester	unit	1	-	1

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	SATUAN	KONDISI		JUMLAH
			BAIK	RUSAK	
143	P.C Unit	unit	91	9	100
144	Lap Top	unit	33	7	40
145	Note Book	unit	1	-	1
146	Personal Komputer lainnya	unit	3	-	3
147	CPU (Peralatan Mainframe)	unit	4	-	4
148	Monitor	unit	4	3	7
149	Printer (Peralatan Personal Komputer)	unit	80	15	95
150	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	unit	-	2	2
151	External/ Portable Hardisk	unit	-	1	1

Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025

C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dapat dilihat dari capaian indikator kinerja baik dari indikator kinerja kunci mapun indikator kinerja lainnya seperti indikator kinerja utama, dan indikator kinerja dalam RPJMD periode sebelumnya. Capaian kinerja pelayanan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

1) Capaian Pembangunan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 diuraian dalam tabel 2.8 berikut ini.

Tabel 2.8
Capaian Pembangunan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	-0,5	0,93	0,28	-0,04	0,2
2.	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,35	2,43	2,41	2,13	2,41
3.	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	%	6,66	6,37	6,31	9,23	12,22
4.	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang Dinilai Kesehatannya untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota	%	33,61	33,61	42,02	43,7	47,95
5.	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan		0	4,78	4,73	8,76	21,29
6.	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas		-33,99	32,21	13,84	-4	228,29

https://jdih.pemalangkab.go.id

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
7.	Persentase Usaha mikro yang difasilitasi pemberdayaan	%	NA	NA	NA	NA	NA
8.	Persentase pertumbuhan UMKM	%	17,5	7,75	12,38	454,03	69,49
9.	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	%	6,66	6,37	6,31	9,23	12,22

Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025

Pertumbuhan volume usaha koperasi mengacu pada peningkatan nilai total penjualan atau pendapatan yang dihasilkan oleh koperasi dalam periode waktu tertentu. Ini dapat diukur melalui peningkatan jumlah barang atau jasa yang terjual, atau melalui total nilai penjualan yang meningkat. Presentase pertumbuhan volume usaha koperasi di Kabupaten Pemalang dari tahun 2020-2024 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Di Tahun 2021 mengalami kenaikan di angka 0,93%, kemudian turun di Tahun 2022 dan 2023, dan Kembali naik pada tahun 2024 menjadi 0,2%. Pendampingan dan pembinaan secara intensif kepada koperasi dalam melakukan Upaya Peningkatan Anggota, Perbaikan Kualitas Produk/Jasa, Promosi dan Pemasaran yang Efektif, Kemitraan Strategis, dan Pengembangan Bisnis yang Cerdas perlu dilakukan untuk meningkatkan volume usaha koperasi di Kabupaten Pemalang. Didukung dengan nilai Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB, persentase koperasi aktif, persentase koperasi sehat, dan Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan dari tahun 2020-2024 yang fluktuatif namun cenderung meningkat seharusnya mampu mendorong pertumbunan volume usaha koperasi di Kabupaten Pemalang.

Pertumbuhan UMKM berperan besar dalam perekonomian, baik dalam penyerapan tenaga kerja, kontribusi terhadap PDB, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Pemalang mengalami kenaikkan yang cukup signifikan dari semula 17,5% di Tahun 2020 sampai 169% di Tahun 2024. Kenaikkan pertumbuhan UMKM ini harus diimbangi dengan memperluas pemasaran produk UMKM melalui pencarian informasi kemitraan dan pasar ekspor oleh Diskoperindag Kabupaten Pemalang untuk menaikkan nilai penjualan UMKM di Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2) Capaian Pembangunan Urusan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024

Sektor perdagangan merupakan tiga besar sektor penyumbang PDRB Kabupaten Pemalang bahkan memiliki kecenderungan terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dalam pemasaran produk yang menandai era industri 5.0. Dalam konteks perdagangan, Pemerintah Kabupaten Pemalang selaku pemilik pasar daerah menghadapi persaingan dalam pengelolaan pasar yang mulai bergeser pada pasar virtual. Harus mulai diterapkan pasar berbasis konvensional-modern-digital, yaitu pengelolaan pasar (pasar daerah dan pasar desa) yang mengacu pada penyediaan layanan pasar (fisik) yang lebih baik dan berkualitas (hyginitas, keamanan dan ketertiban) sehingga dapat bersaing dengan pasar modern yang semakin merebak. Sampai dengan tahun 2024 lokasi PKL yang berhasil ditata baru sebesar 5,26%.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang mengawasi 17 Pasar daerah yaitu Pasar Pemalang, Pasar Comal, Pasar Petarukan, Pasar Randudongkal, Pasar Moga, Pasar Belik, Pasar Warungpring, Pasar Hewan Randudongkal, Pasar Bantarbolang, Pasar Paduraksa, Pasar Pelutan, Pasar Sayur dan Buah, Pasar Beji, Pasar Bojongbata, Pasar Banjardawa, Pasar Ulujami dan Pasar Beras, juga mengawasi perkembangan pasar modern/pasar swalayan/pusat perbelanjaan, salah satunya adalah terkait pemberian dan pengawasan ijin usaha, dan juga mengawasi serta mengelola Gandulan Culinary Center (GCC).

Pemerintah Daerah juga dituntut untuk beradaptasi terhadap digitalisasi. Perlu dilakukan fasilitasi /pendampingan bagi pelaku usaha (perdagangan) agar bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transaksi dan omset perdagangannya. Hal ini selaras dengan salah satu program Bupati Pemalang yang mengedepankan digitalisasi. Perkembangan urusan perdagangan Tahun 2020-2024 tersaji pada tabel 2.9 berikut ini.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.9
Capaian Pembangunan Urusan Perdagangan Kabupaten Pemalang
Tahun 2020- 2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan (PDRB ADHK)	%	-3,49	6,44	4,62	4,64	23,42
2.	Persentase pelaku usaha yang diawasi perizinannya	%	0,5	0,5	99	99	99
3.	Persentase retribusi pasar dalam PAD	%	2,67	2,9	2,97	64,95	84,91
4.	Persentase lokasi PKL yang tertata	%	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26
5.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	38	38	38	38	38
6.	Persentase stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	100	100	100	100	100
7.	Persentase realisasi kinerja pupuk	%	99	85,94	80,60	79,99	76
8.	Ekspor Bersih Perdagangan	Juta US Dollar	26,359	52,73	61,58	48,297	335,735267
9.	Persentase pertumbuhan nilai eksport	%	-34	100	17	-29	595
10.	Persentase alat-alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang di tera ulang	%	3,16	19,84	55,28	9,48	7,86
11.	Persentase pelaku usaha yang difasilitasi pemasarannya	%	30	30	30	30	30
12.	Jumlah Pasar Rakyat yang Memenuhi Kriteria Pasar Sehat	Unit	1	1	1	2	2
13.	Persentase sarana distribusi perdagangan yang memenuhi syarat	%	0	0	1	11,7	11,7
14.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP, pusat perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/SIUP toko swalayan)	%	43,75	100	100	100	100
15.	Persentase pertumbuhan volume perdagangan besar dan eceran dalam daerah	%	-3,49	6,44	4,62	4,64	4,64
16.	Disparitas Harga	%	0,30	0,10	0,01	0,01	0,05

Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa di Tahun 2024 terjadi peningkatan kontribusi retribusi pasar dalam PAD yaitu sebesar 84,91% dari sebelumnya tahun 2023 hanya sebesar 2,97%. Hal ini dikarenakan adanya penerapan e-retribusi di semua pasar dikelola Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Untuk indikator pertumbuhan nilai eksport mengalami kenaikan menjadi 335,7352 juta US Dolar.

Selaras dengan penyusunan RPJPD Kab. Pemalang Tahun 2025- 2045, urusan Perdagangan mengampu satu IUP yaitu Disparitas Harga. Indikator ini merupakan proksi atau pendekatan dari indikator inflasi yang sudah menggunakan perhitungan Kota Tegal. Terdapat 13 komoditas bahan pokok yaitu Beras Medium; Gula Pasir; Minyak Goreng Kemasan Sederhana; Daging Sapi Paha Belakang; Daging Ayam Ras; Telor Ayam Ras; Tepung Terigu; Kedelai Impor; Cabe Merah Keriting; Cabe Rawit Merah; Bawang Merah; Bawang Putih Impor Kating dan Ikan Kembung. Hasil capaian disparitas harga di Kabupaten Pemalang dengan pembanding harga bahan pokok provinsi periode 2020 – 2024 cukup baik. Hal ini dapat dilihat perhitungan disparitas pada periode tersebut masih dibawah nol. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengendalikan harga bahan pokok ini adalah Monitoring harga bahan pokok; Operasi Pasar dan Kegiatan Pasar Murah.

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja pelayanan dalam periode 5 tahun (Renstra 2025-2029) telah menggambarkan bahwa :

1) Program Pengawasan Koperasi, menunjukkan sebagian besar koperasi telah menjalankan operasinya dengan cukup baik dan memenuhi standar yang diperlukan untuk dikategorikan sebagai koperasi yang berkualitas. Hal ini mencerminkan adanya pengelolaan yang baik, partisipasi anggota yang tinggi, dan manajemen yang efisien.
2) Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM), menunjukkan adanya kesadaran yang masih rendah di kalangan pelaku usaha mikro tentang pentingnya perizinan untuk keberlanjutan dan pengembangan usaha mereka. Meskipun ada beberapa tantangan seperti proses administrasi yang rumit dan biaya yang tinggi, dengan adanya pendampingan dan simplifikasi prosedur izin, angka ini bisa meningkat.

https://jdih.pemalangkab.go.id

3) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, menunjukkan adanya lonjakan signifikan yang mencerminkan ekspansi pesat dalam sektor tersebut. Ini bisa disebabkan oleh peningkatan permintaan, ekspansi bisnis, atau kebijakan pemerintah yang mendukung.
4) Program pengembangan ekspor, merupakan indikator positif yang menunjukkan peningkatan daya saing produk dan efektivitas strategi perdagangan. Namun, penting untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan dengan diversifikasi pasar, peningkatan kualitas produk, serta optimalisasi kebijakan dan infrastruktur perdagangan.

Tabel 2.10
Pertumbuhan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2020- 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun					Pertumbuhan Kinerja				Rata-Rata
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	-0,5	0,93	0,28	-0,04	0,2	-0,07	-0,72	-1,04	-0,8	-1,72
2	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,35	2,43	2,41	2,13	2,41	1,43	1,41	1,13	1,41	0,41
3	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	16,58	17,07	16,99	17,07	17,08	16,07	15,99	16,07	16,08	14,99

Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025

Dari tabel di atas, rata-rata pertumbuhan kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut :

1) Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi rata-rata pertumbuhan kinerja sebesar -1,72%;
2) Rasio Kewirausahaan Daerah rata-rata pertumbuhan kinerja sebesar minus 0,41%;
3) Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB rata-rata pertumbuhan kinerja sebesar 14,99%;

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.11
Tabel Evaluasi Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang
Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-				Persentase Capaian Pada Tahun Ke-(%)			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	31	33	36	39	41	43	0,93	0,28	-0,04	0,2	3	0,85	-0,11	0,51
2	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	33,66	34,66	35,66	36,66	37,66	38,66	2,43	2,41	2,13	2,41	7,22	6,95	5,97	6,57
3	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	0,8	1,2	2	2,6	3,4	4	17,07	16,99	17,07	17,08	2133,75	1415,83	853,50	656,92

Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025

Dari tabel diatas capaian indikator kinerja pelayanan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut :

1). Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi prosentase capaian kinerja pada akhir tahun renstra sebesar 0,51%;

2). Rasio Kewirausahaan Daerah prosentase capaian kinerja pada akhir tahun renstra sebesar 6,57%;

3). Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB prosentase capaian kinerja pada akhir tahun renstra sebesar 656,92%.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.12

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2024

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				Persentase Realisasi Anggaran (%)			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.493.840.860	25.241.873.141	23.090.401.503	24.579.554.262	24.579.554.262	27.037.509.688	21.358.037.145	22.947.157.401	20.991.274.094	22.345.049.329	97	94	96	93
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	88.322.245	244.068.550	178.805.000	251.994.600	251.994.600	277.194.060	80.292.950	221.880.500	162.550.000	229.086.000	98	100	100	99
3	Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi	98.450.000	10.242.650	65.447.800	22.341.550	22.341.550	24.575.705	89.500.000	9.311.500	59.498.000	20.310.500	99	100	99	100
4	Program Pendidikan dan latihan perkoperasian	107.811.000	802.945.550	281.663.250	316.413.900	316.413.900	348.055.290	98.010.000	729.950.500	256.057.500	287.649.000	99	99	100	100
5	Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	198.192.830	237.596.150	41.107.000	81.364.767	81.364.767	89.501.244	180.175.300	215.996.500	37.370.000	73.967.970	99	100	100	97
6	Program Pengembangan UMKM	1.523.499.890	2.160.587.000	1.407.019.350	1.838.697.300	1.838.697.300	2.022.567.030	1.384.999.900	1.964.170.000	1.279.108.500	1.671.543.000	100	100	100	97
7	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	22.377.300	169.206.400	3.300.000	11.000.000	11.000.000	12.100.000	20.343.000	153.824.000	3.000.000	10.000.000	99	99	100	100
8	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.863.221.358	5.523.793.953	3.223.646.247	1.563.819.187	1.563.819.187	1.720.201.105	4.421.110.325	5.021.630.866	2.930.587.497	1.421.653.806	99	62	100	100

https://jdih.pemalangkab.go.id

9	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	522.863.965	484.134.461	1.947.322.300	351.978.550	351.978.550	387.176.405	475.330.877	440.122.237	1.770.293.000	319.980.500	99	99	100	100
10	**Program Pengembangan Ekspor**	74.751.820	356.394.394	186.755.580	273.782.378	273.782.378	301.160.616	67.956.200	323.994.904	169.777.800	248.893.071	99	100	100	100
11	**Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**	327.590.437	133.184.549	76.913.273	75.415.726	75.415.726	82.957.299	297.809.488	121.076.863	69.921.157	68.559.751	99	99	100	99
12	**Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negri**	422.872.483	110.766.920	300.037.652	142.950.500	142.950.500	157.245.550	384.429.530	100.697.200	272.761.502	129.955.000	99	100	100	100
13	**Program Perencanaan Pembangunan Industri**	756.213.700	1.004.978.150	1.088.451.949	1.314.396.163	1.314.396.163	1.445.835.780	687.467.000	913.616.500	989.501.772	1.194.905.603	92	98	100	96
14	**Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten/Kota**	84.896.471	54.890.000	74.212.662	123.209.560	123.209.560	135.530.516	77.178.610	49.900.000	67.466.056	112.008.691	88	99	100	86
15	**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**	97.341.200	40.700.000	72.839.903	122.647.234	122.647.234	134.911.957	88.492.000	37.000.000	66.218.094	111.497.485	95	91	98	89
	TOTAL	21.874.300.000	37.489.823.000	30.115.740.000	29.947.720.000	31.069.565.677	34.176.522.244	29.711.282.325	33.250.329.021	29.125.384.972	28.245.059.706	**97**	**88**	**97**	**94**

https://jdih.pemalangkab.go.id

D. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan yang dapat diberikan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang sebagai berikut:

- Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memberikan pelatihan, pendampingan, dan akses pembiayaan untuk meningkatkan daya saing usaha.
- Koperasi dengan cara memberi dukungan pengelolaan koperasi agar lebih profesional dan berdaya guna.
- Industri Rumah Tangga, dengan membantu pengembangan produk lokal dan peningkatan kualitas produksi.
- Pelaku Perdagangan, dengan memberikan informasi pasar, regulasi perdagangan, dan pengawasan harga barang kebutuhan pokok.
- Masyarakat Umum, dengan melakukan edukasi terkait perlindungan konsumen dan peningkatan akses terhadap produk lokal.

E. Mitra Kerja

Tabel 2.13
Daftar OPD mitra Diskoperindag Kabupaten Pemalang

No.	OPD Mitra	Uraian Penanganan	Keterangan
1	Dinas Lingkungan Hidup	Sampah di Pasar	Membantu penangan sampah di Pasar Daerah
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Verifikasi Perijinan	Verifikasi perijinan yang telah diajukan
3	Badan Pendapatan Daerah	Pendapatan Pasar	Monitoring pendapatan agar sesuai Target
4	Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Pemalang	GAS LPG 3 Kg	Monitoring distribusi GAS LPG 3KG
5	Dinas Pertanian	Distribusi Pupuk	Monitoring distribusi Pupuk
6	Alfa/Indo mart	Pemasaran produk unggulan UMKM	Membantu memasarkan produk unggulan UMKM

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025

Pada tabel di atas terdapat empat mitra OPD yang selama ini membantu kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang, yaitu :

1) Dinas Lingkungan Hidup, membantu penangan sampah di Pasar Daerah;
2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

https://jdih.pemalangkab.go.id

memverifikasi perijinan yang telah diajukan;

3) Badan Pendapatan Daerah, monitoring pendapatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang agar sesuai Target;
4) Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Pemalang, monitoring distribusi GAS LPG 3KG supaya terdistribusi ke masyarakat;
5) Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang, monitoring distribusi pupuk supaya terdistribusi ke masyarakat;
6) Alfa/indo mart, membantu memasarkan produk unggulan UMKM.

F. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, bahwa yang dimaksud dengan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) adalah usaha bersama yang lakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Pihak Ketiga dalam Kerja Sama Daerah adalah Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Sebutan Lain, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan Lembaga lainnya di dalam negeri yang berbadan hukum. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang telah menjalin kerjasama dengan pihak ke-3 sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.14 berikut ini.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.14
Daftar Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang

No	PERGURUAN TINGGI / INSTANSI	JANGKA WAKTU	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT
1	Institut Teknologi dan Bisnis Adias Pemalang (KB)	24 Juni 2024 s/d 23 Juni 2029	Pendidikan; pennelitian; pengabdian kepada masyarakat; pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM); pengembangan sumber daya manusia; dan pengembangan potensi daerah.	Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Pemalang.	Menerapkan dan mengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian, potensi sumber daya alam dan manusia, serta pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pemalang.
2	Universitas Negeri Semarang (NK)	4 Juli 2024 s/d 3 Juli 2029	a. Pendampingan legalitas UMKM	Pelaku UMKM yang ada di Kecamatan : - Pemalang - Taman - Petarukan	Jumlah pelaku UMKM yang ada di Kec. : - Pemalang - Taman - Petarukan
			b. Sosialisasi dan pelatihan kepada UMKM rintisan (Keuangan, Packaging, Masa Simpan, Inovasi Produk dan Marketing)	UMKM rintisan yang ada di Kabupaten Pemalang	Jumlah pelaku UMKM rintisan yang mengikuti pelatihan sebanyak 150 pelaku
3	Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto (NK)	9 September 2024 s/d 8 September 2029	a. Pendampingan legalitas UMKM	Pelaku UMKM yang ada di Kecamatan : - Pulosari - Watukumpul - Belik	Jumlah pelaku UMKM yang didampingi
			b. Sosialisasi dan pelatihan kepada UMKM rintisan (Keuangan, Packaging, Masa Simpan, Inovasi Produk dan Marketing)	UMKM rintisan yang ada di Kecamatan : - Pulosari - Watukumpul - Belik	Jumlah pelaku UMKM rintisan yang mengikuti pelatihan sebanyak 150 pelaku
4	Universitas Islam Negeri KH. Abdurahman Wahid Pekalongan (NK)	9 September 2024 s/d 8 September 2029	a. Pendampingan legalitas UMKM	Pelaku UMKM yang ada di Kecamatan : - Randudongkal - Bantarbolang - Warungpring	Jumlah pelaku UMKM yang ada di Kec. : - Randudongkal - Bantarbolang - Warungpring

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	PERGURUAN TINGGI / INSTANSI	JANGKA WAKTU	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT
			b. Sosialisasi dan pelatihan kepada UMKM rintisan (Keuangan, Packaging, Masa Simpan, Inovasi Produk dan Marketing)	UMKM rintisan yang ada di Kabupaten Pemalang	Jumlah pelaku UMKM rintisan yang mengikuti pelatihan sebanyak 150 pelaku

Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

a. Permasalahan

Agar pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sektor koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, dan perdagangan menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek-aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya identifikasi permasalahan maupun perumusan isu-isu strategis dalam penyusunan perencanaan. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada, serta sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kesulitan maupun kegagalan yang bisa mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

Hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dapat dilihat dalam tabel 2.15 di bawah ini.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.15
Pemetaan Permasalahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang

No	Urusan	Sub Urusan	Kewenangan	Indikator	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	1	2	3	4	5	6	7
1	**KOPERASI**	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota	Persentase koperasi sehat	Belum optimalnya koperasi aktif dan sehat	Lemahnya Tata Kelola dan Manajemen Koperasi	Sumber Daya Manusia (SDM) yang Lemah
							Kurangnya Pendidikan Perkoperasian
							Pengawasan dan Regulasi yang Belum Optimal
							Akses Pembiayaan Terbatas
							Kurang Inovatif dan Tidak Adaptif
2	**UMKM**	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.	Persentase pertumbuhan Usaha Mikro	Usaha Mikro yang tidak bisa berkembang dan Belum optimalnya pertumbuhan UMKM	Rendahnya Kapasitas SDM dan Manajemen	Lemahnya akses permodalan
							rendahnya kapasitas SDM dan Kurangnya pelatihan keterampilan teknis dan kewirausahaan
							terbatasnya akses pasar dan Produk belum memiliki daya saing (kemasan, kualitas, atau sertifikasi)
							minimnya adopsi teknologi dan Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran dan operasional
3	PERDAGANGAN	Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal dan Nasional	Tidak optimalnya perkembangan pelaku usaha untuk menjadi potensi eksport.	Kurangnya Pengetahuan dan Literasi Ekspor	Banyak pelaku usaha belum memahami prosedur ekspor, regulasi negara tujuan, serta mekanisme logistik dan pembiayaan ekspor.

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Urusan	Sub Urusan	Kewenangan	Indikator	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	1	2	3	4	5	6	7
							Produk usaha kecil dan menengah belum memenuhi standar kualitas, kontinuitas, dan legalitas untuk pasar ekspor.
							Usaha belum mampu menjalin jejaring atau memanfaatkan platform ekspor digital/global marketplace.

Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dari tabel diatas, berikut pemecahan masalah yang akan di laksanakan melalui program sebagai berikut :

1) Belum optimalnya koperasi aktif dan sehat, pemecahan masalah berupa peningkatan kapasitas SDM perkoperasian melalui pelatihan-pelatihan tentang perkoperasian, dilaksanakan melalui program pendidikan dan latian perkoperasian.
2) Usaha Mikro yang tidak bisa berkembang dan Belum optimalnya pertumbuhan UMKM, pemecahan masalah berupa pelatihan kapasitas SDM dan ketrampilan teknis kewirausahaan, dilaksanakan melalui program pengembangan UMKM.
3) Tidak optimalnya perkembangan pelaku usaha untuk menjadi potensi eksport, pemecahan masalah berupa melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha yang banyak belum memahami prosedur ekspor, regulasi negara tujuan, serta mekanisme logistik dan pembiayaan ekspor, dilaksanakan melalui program pengembangan ekspor.

b. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah pada masa mendatang. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi menjadi masalah daerah pada suatu saat, dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan (Permendagri 86/2017).

Dengan memperhatikan permasalahan yang ada, gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah pada rancangan RPJMN Kementerian Koperasi dan UKM, serta implikasi RTRW, KLHS, maka dapat dirumuskan isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang. Hasil identifikasi isu strategis yang dihadapi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dalam tabel 2.17 di bawah ini. Setidaknya ada 3 (tiga) isu strategis yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Mengengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang, yaitu :

1) Peningkatan Kapasitas dan Ketrampilan Koperasi dan UMKM

   Program pelatihan dan pendampingan bisnis diharapkan bisa membantu UMKM berkembang lebih cepat. Pelatihan yang

https://jdih.pemalangkab.go.id

diperlukan tentang manajemen keuangan, pemasaran, dan pengelolaan produksi. Program ini akan menyesuaikan dengan adanya program koperasi merah putih dari Pemerintah Pusat.

2) Peningkatan Akses Pembiayaan

Banyak koperasi dan UMKM mengalami kesulitan mendapatkan modal usaha. Solusinya bisa berupa program kredit dengan bunga rendah, kemudahan akses ke modal ventura.

3) Peningkatan Akses Pasar

UMKM sering kesulitan memperluas jangkauan pasar mereka, ditambah lagi dengan isu global adanya kebijakan pemerintah USA terkait dengan tarif impor yang sangat berdampak pada pasar komoditas Indonesia. Strategi seperti integrasi dengan rantai pasok perusahaan besar, promosi berbasis digital, serta akses ke pasar ekspor bisa menjadi solusi efektif.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.16
Pemetaan Isu Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			ISU Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	Rendahnya prosentase koperasi sehat			Koperasi Merah Putih untuk memperkuat ekonomi desa dengan target 80.000 koperasi modern.		Masih rendahnya kapasitas dan ketrampilan Koperasi dan UMKM
	Rendahnya rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB					
	Masih rendahnya pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil.	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur masih rendah, 4,51% sedangkan targetnya 8,1 %		Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan UMKM	Bantuan modal untuk UMKM	Masih rendahnya akses pembiayaan
	Terbatasnya sarana promosi bagi pelaku usaha perdagangan di Kabupaten Pemalang		Kebijakan USA terkait Perdagangan Internasional dengan menerapkan tarif impor baru terhadap beberapa komoditas dari negara lain, termasuk Indonesia.			Masih rendahnya akses pasar
	Belum adanya pelaku usaha Kabupaten Pemalang yang mampu melakukan ekspor secara mandiri		Pengendalian Inflasi	Pengendalian Inflasi	Pengedalian Inflasi Daerah	
	Rendahnya kualitas SDM			Pengembanagan Industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Pengembanagan Industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	

Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.17
Realisasi Pendapatan dari Tahun 2020 - 2024

No	Jenis Retribusi	Target 2020	Pendapatan Tahun 2020	%	Target 2021	Pendapatan Tahun 2021	%	Target 2022	Pendapatan Tahun 2022	%	Target 2023	Pendapatan Tahun 2023	%	Target 2024	Pendapatan Tahun 2024	%
1	Retr. Pelayanan Kebersihan	1.052.840.000	1.355.535.180	128,75	1.234.000.000	489.867.800	39,70									
	- Pasar Daerah	1.052.840.000	1.355.535.180	128,75	1.234.000.000	489.867.800	39,70									
2	Retr. Pelayanan Pasar	4.780.000.000	6.128.336.375	128,21	7.700.000.000	8.163.747.492	106,02	11.959.000.000	9.448.917.969	79,01	14.000.000.000	9.176.760.430	65,55	11.000.000.000	9.340.702.202	84,92
	- Retr. Harian	4.505.000.000	5.787.740.800	128,47	7.425.000.000	8.049.000.892	108,40	11.959.000.000	9.448.917.969	79,01	14.000.000.000	9.176.760.430	65,55	11.000.000.000	9.340.702.202	84,92
	- Retr. KLTL	175.000.000	224.228.675	128,13	175.000.000	65.640.600	37,51									
	- Retr. Meninggalkan Barang	100.000.000	116.366.900	116,37	100.000.000	49.106.000	49,11									
3	Retr. Grosir / Pertokoan	420.160.000	540.227.900	128,58	525.200.000	127.121.400	24,20									
	- Retr. Grosir / Pertokoan	420.160.000	540.227.900	128,58	525.200.000	127.121.400	24,20									
4	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ula	50.000.000	54.994.500		75.000.000	82.328.500	109,77	85.000.000	106.577.500	125,00	100.000.000	104.185.500	104,19			
	- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ul	50.000.000	54.994.500		75.000.000	82.328.500	109,77	85.000.000	106.577.500	125,00	100.000.000	104.185.500	104,19			
5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	130.791.000	703.306.840		404.357.000	455.574.950	112,67	350.000.000	313.374.020	90,00	150.000.000	228.000.000	152,00	60.000.000	157.110.000	261,85
	Pendapatan Sewa	130.791.000	703.306.840		404.357.000	455.574.950	112,67	350.000.000	313.374.020	90,00	150.000.000	228.000.000	152,00	60.000.000	157.110.000	261,85
	Jumlah	6.433.791.000	8.782.400.795	136,50	9.938.557.000	9.318.640.142	94,00	12.394.000.000	9.868.869.489	80,00	14.000.000.000	9.176.760.430	65,55	14.000.000.000	9.340.702.202	84,45

Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025

Keterangan:

- ✓ Pada Tahun 2020 pendapatan melebihi target yang ditentukan dengan realisasi sebesar 136,5 %, sedangkan di tahun 2021 pendapatan mengalami penurunan dikarenakan ada kenaikan target dari target tahun 2020 sebesar Rp 6.433.791.000,- naik ditahun 2021 menjadi Rp. 9.938.557.000,- sehingga capaian realisasi pendapatan tidak mencapai target, realisasi sebesar 94%;
- ✓ Kemudian di tahun 2022 ada kenaikan target pendapatan menjadi Rp. 12.394.000.000,- dan pada tahun tersebut kembali realisasi tidak mencapai target yang ditetapkan, realisasi pendapatan hanya 80%;
- ✓ Selanjutnya ditahun 2023 dan 2024 target kemabali dinaikan menjadi Rp. 14.000.000.000,- dan realisasi tetap tidak tercapai dari target yang ditentukan tersebut, pendapatan di tahun 2023 hanya 65,55% dan di tahun 2024 sebesar 84,45%;
- ✓ Target tidak bisa tercapai karena belum meratanya penarikan retribusi secara e-retribusi di semua pasar, disamping itu sarana dan prasarana pasar daerah yang kalah dengan toko modern sehingga banyak para pembeli yang tidak berbelanja di pasar tradisional.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Kepala Daerah terpilih telah ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 20 Februari 2025. Bupati dan Wakil Bupati memiliki periode masa jabatan 2025-2030. Visi Bupati dan Wakil Bupati untuk periode RPJMD Tahun 2025-2029 adalah **"PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA"**. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah dan menjadi pedoman stakeholder terkait, untuk merumuskannya ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Visi ini memiliki pembentuk kata dengan makna sebagai berikut:

1. **Bersih** dimaknai Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan.
2. **Cakap** dimaknai memiliki sumber daya manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
3. **Handal** dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.
4. **MULYA**: Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius. Mulya ini juga menjadi Visi dari RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045.

Dalam rangka mencapai visi PEMALANG BERCAHAYA, berikut ini misi RPJMD berdasarkan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih yaitu **RHAPSODI (Resik, Hijau, Apik, Peduli, Silaturahmi, Organisatoris, Digitalisasi dan Ikhlas)**, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Misi 1 Resik:** menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih.

   Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik.

2. **Misi 2 Hijau:** meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sektor unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi berdasarkan potensi lokal yaitu peningkatan pengelolaan pertanian yang ramah lingkungan, hilirisasi pertanian, pengembangan industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong proses sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.

3. **Misi 3 Apik:** meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penataan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ke tingkat desa. Membangun Pemalang dari desa sampai kota.

4. **Misi 4 Peduli:** meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi.

5. **Misi 5 Silaturahmi:** meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, saling menghormati serta kepedulian terhadap sesama.

6. **Misi 6 Organisatoris:** meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan Good Governance, Clean Governance dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.

7. **Misi 7 Digitalisasi:** memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam

https://jdih.pemalangkab.go.id

pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi

8. **Misi 8 Ikhlas:** menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan.

Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, mengembangkan kearifan dan budaya lokal.

Dari 8 (delapan) misi tersebut, misi yang berkaitan dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang adalah **Misi ke-5 Silaturahmi** yaitu meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong,tepa selira dan sejahtera. Pengertian misi ini, bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, dan saling menghormati dan teposliro.

Dalam rangka membantu pencapaian visi dan misi Bupati Pemalang tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang perlu mengidentifikasi isu-isu strategis yang menjadi tantangan sekaligus peluang dalam kurun waktu perencanaan tahun 2025–2029. Isu strategis ini merupakan hasil analisis terhadap kondisi internal dan eksternal, capaian kinerja periode sebelumnya, arah kebijakan nasional, provinsi, dan daerah, serta aspirasi pelaku usaha dan masyarakat.

Secara umum, ***isu strategis*** yang dihadapi Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. **Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi**
   UMKM dan koperasi masih menghadapi keterbatasan dalam hal akses permodalan, kualitas SDM, inovasi produk, dan pemanfaatan teknologi digital. Di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, diperlukan strategi peningkatan daya saing melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas produk, standardisasi, sertifikasi, serta digitalisasi usaha.
2. **Penguatan Ekonomi Kerakyatan melalui Transformasi Digital**
   Perkembangan teknologi informasi membuka peluang besar bagi UMKM dan koperasi untuk memperluas jaringan pemasaran. Namun, rendahnya literasi digital pelaku usaha menjadi tantangan dalam transformasi ekonomi berbasis digital. Diperlukan kebijakan yang mendorong digitalisasi UMKM dan koperasi agar mampu beradaptasi dengan dinamika perdagangan modern.
3. **Pengembangan Akses Permodalan dan Kemitraan Usaha**
   Keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal masih menjadi hambatan utama perkembangan UMKM dan koperasi. Isu strategis ini

https://jdih.pemalangkab.go.id

menuntut adanya kebijakan untuk memperluas skema pembiayaan yang inklusif, memperkuat peran lembaga keuangan mikro, serta mendorong kemitraan usaha dengan pihak swasta maupun BUMN/BUMD.

4. **Stabilisasi dan Pengendalian Harga Barang Kebutuhan Pokok** Bidang perdagangan memiliki tantangan dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok di pasar tradisional maupun modern. Fluktuasi harga akibat dinamika global, gangguan distribusi, maupun faktor musiman menuntut penguatan sistem distribusi, pengawasan, dan koordinasi lintas sektor.
5. **Penguatan Infrastruktur dan Sarana Perdagangan** Kondisi pasar tradisional di beberapa wilayah Kabupaten Pemalang masih memerlukan revitalisasi agar mampu menjadi pusat perdagangan yang bersih, sehat, aman, dan berdaya saing. Modernisasi pasar serta pengembangan infrastruktur pendukung distribusi barang menjadi isu strategis dalam mendorong pertumbuhan perdagangan lokal dan regional.
6. **Peningkatan Daya Saing Produk Lokal untuk Ekspor** Kabupaten Pemalang memiliki potensi produk unggulan yang berorientasi ekspor, seperti hasil pertanian, perikanan, kerajinan, dan industri kecil. Namun, daya saing produk ekspor masih terbatas akibat kendala kualitas, standardisasi, branding, dan akses pasar global. Isu ini menuntut strategi peningkatan kualitas produk, promosi, serta pengembangan jejaring perdagangan internasional.

Dengan memperhatikan isu-isu strategis tersebut, Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang perlu merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan yang tepat sasaran, terintegrasi, serta mampu memberikan dampak signifikan bagi penguatan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di periode 2025–2029.

➔ ***Strategi Penanganan Isu Strategis***

Untuk menjawab isu strategis yang telah diidentifikasi, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang menetapkan arah strategi sebagai berikut:

1. **Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi**
   - Melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku UMKM dan koperasi melalui pelatihan manajemen usaha, kewirausahaan, dan inovasi produk.
   - Mendorong penerapan standar mutu, sertifikasi halal, keamanan pangan, serta perlindungan hak kekayaan intelektual bagi produk lokal.
   - Memfasilitasi pameran, promosi, dan pemasaran produk unggulan daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id

baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

2. **Strategi Transformasi Digital UMKM dan Koperasi**
   - Menyediakan pendampingan literasi digital dan e-commerce bagi pelaku UMKM dan koperasi.
   - Mengembangkan platform pemasaran digital yang terintegrasi dengan marketplace nasional maupun lokal.
   - Mendorong pemanfaatan aplikasi keuangan digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan usaha.
3. **Strategi Pengembangan Akses Permodalan dan Kemitraan Usaha**
   - Memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan koperasi melalui kerja sama dengan perbankan, lembaga keuangan mikro, fintech, dan BUMDes.
   - Mendorong terbentuknya pola kemitraan usaha antara UMKM dengan perusahaan besar, BUMN/BUMD, maupun retail modern.
   - Memperkuat fungsi lembaga penjaminan kredit serta lembaga keuangan non-bank yang mendukung UMKM.
4. **Strategi Stabilisasi dan Pengendalian Harga Barang Kebutuhan Pokok**
   - Mengoptimalkan fungsi monitoring dan pengawasan harga serta distribusi barang kebutuhan pokok.
   - Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, pelaku distribusi, dan asosiasi pedagang dalam menjaga kelancaran pasokan.
   - Menyelenggarakan operasi pasar dan kegiatan stabilisasi harga pada periode tertentu, terutama menjelang hari besar keagamaan.
5. **Strategi Penguatan Infrastruktur dan Sarana Perdagangan**
   - Melaksanakan revitalisasi pasar tradisional agar lebih representatif, higienis, dan ramah lingkungan.
   - Meningkatkan sarana pendukung perdagangan seperti gudang, cold storage, serta sistem logistik yang efisien.
   - Mendorong terwujudnya tata kelola pasar berbasis digital melalui penerapan sistem informasi manajemen pasar.
6. **Strategi Peningkatan Daya Saing Produk Lokal untuk Ekspor**
   - Melakukan pembinaan dan fasilitasi standardisasi serta sertifikasi produk ekspor.
   - Mendorong promosi dan pemasaran produk unggulan daerah melalui business matching, pameran internasional, dan diplomasi dagang.
   - Mengembangkan jejaring kerja sama perdagangan luar negeri serta meningkatkan kolaborasi dengan eksportir dan pelaku usaha global.

https://jdih.pemalangkab.go.id

3.1. Tujuan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 (Renwal) dan yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang yaitu :

a. Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel (T2) dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi, dengan sasaran yang ingin adalah Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik (S2.2) dengan indikator :
   - Nilai SAKIP;
   - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
b. Meningkatkan daya saing pembangunan daerah (T3) dengan indikator Indeks Daya Saing Daerah. Sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :
   - Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi lokal (S3.3);
   - Meningkatnya pengendalian harga bahan pokok dan penting (S3.6).

Sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 tersebut akan menjadi tujuan strategis seluruh Perangkat Daerah.

Dengan demikian, tujuan strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan tahun 2025-2029 adalah :

a. Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik;
b. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi lokal;
c. Meningkatnya pengendalian harga bahan pokok dan penting.

Sesuai dengan Imendagri No. 2 tahun 2025 bahwa direkomendasikan agar Renstra Perangkat Daerah cukup memiliki 1 (satu) tujuan dan dengan mempertimbangkan NSPK maka tujuan strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang adalah "**Meningkatnya sektor Koperasi, UMKM dan Perdagangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi lokal".**

https://jdih.pemalangkab.go.id

3.2. Sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Sasaran strategis adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, serta untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

a. Meningkatnya volume usaha koperasi terhadap PDRB dengan indikator rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB.
b. Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha dengan indikator persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha.
c. Meningkatnya nilai ekspor dengan indikator nilai ekspor meningkat.
d. Meningkatnya kualitas pelayanan perangat daerah dengan indikator indeks pelayanan publik.

Berikut ini disajikan tabel 3.1 tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan periode jangka menengah tahun 2025- 2029.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN		TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	Indikator Sasaran	BASE LINE	TARGET						KETERANGAN
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal (S3).	Meningkatnya peran koperasi, UMKM dan Perdagangan dalam perekonomian daerah	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Terwujudnya birokrasi yang akuntabel dan melayani	Nilai SAKIP	68,42	69,42	69,62	70,22	70,82	71,42	72,02	Rankhir RPJMD
			Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB		Indeks Kepuasan Masyarakat	4,41	4,51	4,53	4,55	4,57	4,6	4,63	Rankhir RPJMD
				Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB		0,2	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	Rankhir RPJMD
					Persentasi usaha mikro yang menjadi wirausaha		2,91	3,41	3,91	4,41	4,91	5,41	Rankhir RPJMD
				Meningkatnya Nilai Ekspor	Nilai Ekspor	335.735.267	352.522.031	370.148.132	388.655.539	408.088.316	428.492.732	449.917.368	Rankhir RPJMD

Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dan link RPJMD yang sudah disepakati.

https://jdih.pemalangkab.go.id

3.3 Strategi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra tahun 2025-2029.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada sektor koperasi, usaha mikro kecil dan menengah serta perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kabupaten Pemalang menetapkan berbagai strategi yang diarahkan pada penguatan kelembagaan, peningkatan daya saing, serta perluasan akses pasar. **Strategi yang ditempuh disusun secara terintegrasi dan berkesinambungan, dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis, potensi unggulan daerah, serta tantangan globalisasi dan digitalisasi perdagangan.**

Pertama, pada aspek **kelembagaan koperasi,** strategi yang dilaksanakan adalah penguatan tata kelola, revitalisasi koperasi tidak aktif, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi. Upaya ini ditujukan agar koperasi dapat berfungsi sebagai wadah ekonomi rakyat yang sehat, mandiri, dan berdaya saing, sekaligus menjadi penopang utama dalam membangun ekonomi daerah berbasis kebersamaan dan gotong royong. Hal ini selaras dengan program Pemerintah Pusat yaitu : ***Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di setiap Desa,*** melalui Inpres No. 9/2025 dengan ambisi membentuk 70.000-80.000 koperasi di seluruh desa/kelurahan Indonesia, dan di Kabupaten Pemalang sudah terbentuk Koperasi Merah Putih sejumlah 223 Koperasi sesuai jumlah Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Pemalang, dengan Fokus utamanya adalah memperkuat ketahanan pangan, entri rantai distribusi, dan mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat desa, diharapkan menjadi alternatif dari jeratan rentenir, tengkulak, hingga pinjaman online yang membebani masyarakat. Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi fondasi baru ekonomi desa berorientasi mandiri, transparan, dan produktif. Dengan dukungan kebijakan, pendanaan, dan partisipasi aktif warga, program ini memiliki potensi besar meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi pedesaan di Indonesia.

Kedua, pada aspek **pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah,** strategi yang ditempuh meliputi pengembangan kapasitas usaha, fasilitasi peningkatan kualitas produk melalui standarisasi, sertifikasi, dan inovasi kemasan, serta penyediaan akses permodalan yang lebih luas melalui skema pembiayaan yang terjangkau. Selain itu, dilakukan pula pembentukan pusat inkubasi bisnis untuk mendukung proses hilirisasi produk serta mendorong

https://jdih.pemalangkab.go.id

peningkatan nilai tambah UMKM secara berkelanjutan.

Ketiga, pada aspek **perdagangan dan perluasan akses pasar,** strategi diarahkan pada penguatan promosi produk unggulan daerah melalui pameran, festival, dan kerjasama dengan berbagai platform perdagangan daring maupun luring. Disamping itu, dilakukan fasilitasi kemitraan usaha dengan ritel modern, eksportir, serta jejaring perdagangan antar daerah. Langkah ini diharapkan mampu membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk UMKM Kabupaten Pemalang sekaligus meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah.

Keempat, dalam rangka **menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok,** strategi yang ditempuh adalah penguatan sistem informasi pasar berbasis digital, peningkatan efektivitas operasi pasar, serta koordinasi lintas sektor dalam menjaga distribusi barang. Dengan demikian, masyarakat tetap memperoleh akses barang kebutuhan pokok dengan harga yang wajar dan stabil.

Kelima, pada **aspek perlindungan konsumen,** strategi diarahkan pada peningkatan edukasi konsumen, penguatan pengawasan barang beredar, serta penegakan regulasi perdagangan yang berkeadilan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim perdagangan yang sehat, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak-hak konsumen dan pelaku usaha.

3.4 Arah Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra tahun 2025-2029.

Arah Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 sebagai berikut :

a. Penguatan kelembagaan usaha koperasi dan usaha mikro;
b. Peningkatan kualitas SDM, akses pasar, teknologi, kualitas produk dan pembiayaan bagi koperasi dan usaha mikro;
c. Peningkatan nilai produk dan jangkauan pemasaran koperasi dan usaha mikro;
d. Fasilitasi pelatihan Digital Marketing bagi UMKM sebagai bentuk penyesuaian strategi usaha di era normal baru;
e. Penguatan basis data UMKM;
f. Penguatan kemitraan dengan lembaga keuangan dalam penyaluran bantuan usaha UMKM;

https://jdih.pemalangkab.go.id

g. Mendorong pengembangan produk unggulan daerah (hasil pertanian, perikanan, UMKM, dan IKM) yang memiliki potensi pasar global;
h. Penguatan klaster UMKM berbasis sumber daya lokal (misalnya: olahan ikan, batik, mebel, makanan olahan);
i. Peningkatan kualitas produksi agar memenuhi standar mutu internasional;
j. Fasilitasi sertifikasi standar internasional (SNI, HACCP, ISO, halal, organik);
k. Dukungan teknologi pengolahan, pengemasan, dan desain produk yang menarik untuk pasar ekspor;
l. Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha tentang ekspor, digital marketing, dan manajemen bisnis global.

Berikut ini matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dari Renstra tahun 2025-2029 Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dalam Tabel 3.2.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.2
Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang

T u j u a n :		Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
Meningkatnya sektor Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi lokal	1	Terwujudnya birokrasi yang akuntabel dan melayani	Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	1	Perbaikan data dukung SAKIP sesuai dengan standarnya
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1	Meningkatkan standart pelayanan publik
				2	Meningkatkan sarana dan prasaranan yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik
	2	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro	Penguatan Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	1	Penguatan kelembagaan usaha koperasi dan usaha mikro
				2	Peningkatan kualitas SDM, akses pasar, teknologi, kualitas produk dan pembiayaan bagi koperasi dan usaha mikro
				3	Peningkatan nilai produk dan jangkauan pemasaran koperasi dan usaha mikro
			Penguatan Presentasi Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	1	Fasilitasi pelatihan Digital Marketing bagi UMKM sebagai bentuk penyesuaian strategi usaha di era normal baru
				2	Penguatan basis data UMKM
				3	Penguatan kemitraan dengan lembaga keuangan dalam penyaluran bantuan usaha UMKM
	3	Meningkatnya Nilai Eksport	Peningkatan Nilai Ekport	1	Mendorong pengembangan produk unggulan daerah (hasil pertanian, perikanan, UMKM, dan IKM) yang memiliki potensi pasar global
				2	Penguatan klaster UMKM berbasis sumber daya lokal (misalnya: olahan ikan, batik, mebel, makanan olahan)
				3	Peningkatan kualitas produksi agar memenuhi standar mutu internasional
				4	Fasilitasi sertifikasi standar internasional (SNI, HACCP, ISO, halal, organik)
				5	Dukungan teknologi pengolahan, pengemasan, dan desain produk yang menarik untuk pasar ekspor
				6	Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha tentang ekspor, digital marketing, dan manajemen bisnis global

Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dan link RPJMD yang sudah disepakati.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dalam rangka mencapai Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang di atas maka selanjutnya dilakukan penahapan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Penahapan pembangunan ini sangat penting karena memungkinkan pengelolaan sumber daya dan waktu secara efisien, mendukung koordinasi antar sektor, dan memastikan pencapaian tujuan pembangunan secara berkelanjutan. Penahapan juga merupakan evaluasi dan penyesuaian rencana pembangunan bidang koperasi, UMKM dan Perdagangan secara berkala, sehingga lebih fleksibel terhadap perubahan kondisi internal maupun eksternal.

Penahapan pembangunan dimaksud dapat disajikan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Penahapan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang

TAHAP I (2026)	**TAHAP I (2027)**	**TAHAP III (2028)**	**TAHAP IV (2029)**	**TAHAP V (2030)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tahap Konsolidasi dan Fondasi : - Konsolidasi data dan pemetaan koperasi, UMKM, serta perdagangan. - Penguatan regulasi, tata kelola, dan sistem pelayanan publik. - Peningkatan kapasitas aparatur melalui diklat dan pendampingan. - Penyusunan roadmap pengembangan koperasi, UMKM, dan perdagangan berbasis potensi lokal.	**Tahap Penguatan Kapasitas dan Infrastruktur** - Peningkatan kompetensi SDM pelaku usaha melalui pelatihan manajemen dan kewirausahaan. - Fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan. - Pengembangan digitalisasi koperasi dan UMKM. - Penyediaan sarana dan prasarana perdagangan (revitalisasi pasar rakyat, gudang, dan fasilitas logistik).	**Tahap Ekspansi dan Integrasi Pasar** - Promosi dan pemasaran produk unggulan daerah secara lebih luas. - Fasilitasi keikutsertaan pelaku usaha dalam pameran dagang nasional/ regional. - Penguatan jejaring kemitraan usaha dan rantai pasok. -Pengembangan sistem distribusi dan logistik terpadu.	**Tahap Hilirisasi dan Peningkatan Daya Saing** - Peningkatan kualitas produk melalui sertifikasi, standarisasi, dan branding. - Perluasan akses pasar ekspor. - Penguatan koperasi modern yang berbasis teknologi dan inovasi.	**Tahap Kemandirian dan Keberlanjutan** - Pemantapan ekosistem usaha yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. - Implementasi prinsip ekonomi hijau dalam pengembangan UMKM dan perdagangan. - Peningkatan kualitas tata kelola koperasi yang sehat dan mandiri. - Pemalang sebagai pusat UMKM unggul dengan daya saing global.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Penahapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2026–2030 disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas nasional, dinamika ekonomi global, serta kebutuhan penguatan sektor koperasi, UMKM, dan perdagangan di daerah.

Penahapan ini dimaksudkan agar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dapat dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan terukur dalam kurun waktu lima tahun.

1. **Tahun 2026 (Tahap I)**

   Pada tahun pertama, fokus diarahkan pada konsolidasi program, penguatan kelembagaan, serta pembangunan fondasi tata kelola birokrasi yang akuntabel dan melayani. Program utama meliputi: penguatan data base koperasi dan UMKM, pembenahan regulasi dan sistem pelayanan perizinan, serta pengembangan kapasitas SDM aparatur dan pelaku usaha.

2. **Tahun 2027 (Tahap II)**

   Pada tahun kedua, penahapan diarahkan pada peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung perdagangan. Langkah ini ditempuh melalui fasilitasi pelatihan kewirausahaan, akses pembiayaan, pengembangan digitalisasi usaha, serta penyediaan infrastruktur perdagangan seperti pasar rakyat yang representatif.

3. **Tahun 2028 (Tahap III)**

   Pada tahun ketiga, fokus pembangunan diarahkan pada perluasan jangkauan pasar koperasi dan UMKM baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Upaya dilakukan melalui peningkatan promosi produk unggulan daerah, fasilitasi pameran dagang, pengembangan jejaring kemitraan, serta penguatan sistem logistik dan distribusi barang.

4. **Tahun 2029 (Tahap IV)**

   Pada tahun keempat, prioritas diarahkan pada penguatan nilai tambah produk melalui hilirisasi dan diversifikasi usaha. Program strategis meliputi sertifikasi mutu dan standar produk, serta perluasan akses ekspor bagi produk unggulan Kabupaten Pemalang.

5. **Tahun 2030 (Tahap V)**

   Pada tahun kelima, pembangunan difokuskan pada pencapaian kemandirian koperasi, UMKM, dan perdagangan yang berdaya saing

https://jdih.pemalangkab.go.id

tinggi serta berkelanjutan. Penguatan ekosistem usaha dilakukan melalui penerapan prinsip ekonomi hijau, peningkatan kualitas tata kelola koperasi yang sehat, dan pemantapan Pemalang sebagai daerah dengan basis UMKM dan perdagangan yang tangguh serta mampu bersaing di tingkat global.

Dengan tahapan tersebut, diharapkan pada akhir periode 2026–2030, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Kabupaten Pemalang mampu mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan melayani, koperasi dan UMKM yang kuat, serta sistem perdagangan yang modern dan berdaya saing.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk dapat mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program setiap tahun atau indikator capaian sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

4.1 Uraian Program

Dalam rangka untuk mewujudkan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan maka telah dipetakan Program Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dalam periode tahun 2025-2029, sebagai berikut:

a. Sekretariat

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pemalang dengan sasaran :

1) Meningkatnya kualitas pelayanan dengan indikator Indeks Pelayanan Publik pada akhir periode Renstra mencapai 4,7 dari kondisi awal 4,54.
2) Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan melayani dengan indikator capaian Skor SAKIP dan Maturitas SPIP masing-masing 71,42 dan 2,985.

b. Bidang Koperasi

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi dengan outcome yang diharapkan yaitu meningkatkan pembinaan dan pengawasan koperasi;
2) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan outcome yang diharapkan yaitu meningkatkan kinerja pengelolaan Koperasi;

https://jdih.pemalangkab.go.id

3) Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian dengan outcome yang diharapkan yaitu meningkatkan kualitas SDM perkoperasian.

c. Bidang UMKM

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) dengan outcome yang diharapkan yaitu meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri;
2) Program Pengembangan UMKM dengan outcome yang diharapkan yaitu meningkatnya daya saing UMKM ;

d. Bidang Perdagangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan outcome yang diharapkan yaitu meningkatnya legalitas perusahaan;
2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan outcome yang diharapkan yaitu meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien;
3) Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan outcome yang diharapkan yaitu meningkatnya kelancaran distribusi dan stabiltas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
4) Program Pengembangan Ekspor dengan outcome yang diharapkan yaitu meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor;
5) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan outcome yang diharapkan yaitu meningkatnya tertib niaga dan mutu produk;
6) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan outcome yang diharapkan yaitu meningkatnya Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.2 Uraian Kegiatan

Rincian lebih lanjut atas rencana program, kegiatan dan subkegiatan dengan indikator masing-masing capaian diuraikan pada tabel 4.1 dibawah ini.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.1

Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN		TUJUAN	SASARAN		OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	
1	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi lokal (S3.3);	Meningkatnya sektor Koperasi, UMKM, dan Perdagangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi lokal					Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi		
2							Rasio Kewirausahaan Daerah		
3							Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB		
							Nilai SAKIP		
							Indeks Pelayanan Publik		
					Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan melayani		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			1	Terwujudnya birokrasi yang akuntabel dan melayani		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan kinerja, evaluasi	% terpenuhunya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan kinerja, evaluasi yang tesusun		Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
						Tersusunnya dokumen administrasi keuangan	% Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD	% Aktivitas administrasi barang milik daerah yang dilaksanakan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	% terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	% terpenuhinya pengadaan barang milik daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
						Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah	% terpenuhinya jasa penjunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Terpenuhinya jumlah aktivitas administrasi barang milik daerah yang dilaksanakan	% terpenuhinya administrasi BMD		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN		TUJUAN	SASARAN		OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	
		Meningkatnya sektor Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi lokal	2	Meningkatnya volume usaha koperasi terhadap PDRB			Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB		
					Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi		% Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
						Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/kota
					Meningkatnya kinerja pengelolaan Koperasi		% Koperasi aktif	3	Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi
						Jumlah laporan hasil penilaian kesehatan koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penilaian Kesehatannya		Penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
					Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian		% koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	4	Program Pendidikan dan latihan perkoperasian
						Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian		Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota
					Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri		Pertumbuhan wirausaha	5	Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)
						Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan		Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN		TUJUAN		SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR		PROGRAM/KEGIATAN/SUB-KEGIATAN
		Meningkatnya sektor Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi lokal	3	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha			Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha		
					Meningkatnya daya saing UMKM		Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	6	Program Pengembangan UMKM
						Terfasilitasinya Usaha Mikro menjadi usaha kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi		Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha
					Meningkatnya legalitas koperasi		% Koperasi yang memiliki izin usaha	7	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
						Tersedianya LHP Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasandan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
					Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien		% sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	8	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
						Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
					Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabiltas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		% stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	9	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
						Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
						Terlaksananya operasi pasar reguler dan khusus	jumlah kegiatan operasi pasar reguler dan khusus		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
						Laporan hasil pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi	Jumlah pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	KET
	Meningkatnya sektor Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi lokal	4 Meningkatnya nilai ekspor			Nilai Ekspor		
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor		Nilai ekspor barang	10 Program Pengembangan Ekspor	
				Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional/Lokal	Jumlah Pelaku Usaha terfasilitasi pada Pameran Dagang Nasional/Lokal	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi ProdukEkspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk		% penanganan pengaduan konsumen	11 Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
				Terlaksananya kegiatan metrologi legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
			Meningkatnya Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri		% promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	12 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negri	
				Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.3 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator Target dan Pagu Indikatif

Berikut ini rincian program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator target dan pagu indikatif dalam tabel 4.2.

Program sampai dengan tahun 2029 telah dilengkapi yang merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang yaitu sebagai pijakan penyusunan Renja Tahun 2026.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				24.550.776.000,00		28.001.031.005,00		28.001.031.005,00		28.701.031.005,00		29.001.031.005,00		
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				22.457.958.000,00		25.205.816.085,00		25.205.816.085,00		25.205.816.085,00		25.205.816.085,00		
Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi (%)	18.090.190.755	20.854.904.290	22.457.958.000,00	22.940.394.719	25.205.816.085,00	25.234.434.191	25.205.816.085,00	27.757.877.610	25.205.816.085,00	30.533.665.371	25.205.816.085,00	2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan	
	Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi (%)	4.073.621.245	3.525.288.910		3.877.817.801		4.265.599.581		4.692.159.539		5.161.375.493			
2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				70.018.000,00		74.500.500,00		77.500.000,00		81.700.000,00		84.900.000,00		
Prosentase terpenuhunya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan kinerja, evaluasi yang tersusun	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	100	100	70.018.000,00	100	74.500.500,00	100	77.500.000,00	100	81.700.000,00	100	84.900.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	100	100		100		100		100		100			

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi)													
	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)													
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	100	100		100		100		100		100			
2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				16.000.000,00		17.000.000,00		18.000.000,00		19.000.000,00		20.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	100	100	16.000.000,00	100	17.000.000,00	100	18.000.000,00	100	19.000.000,00	100	20.000.000,00		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.17.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				8.169.500,00		8.300.500,00		8.700.000,00		9.000.000,00		9.200.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	100	100	8.169.500,00	100	8.300.500,00	100	8.700.000,00	100	9.000.000,00	100	9.200.000,00		
2.17.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.019.000,00		3.200.000,00		3.400.000,00		3.800.000,00		4.200.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	100	100	2.019.000,00	100	3.200.000,00	100	3.400.000,00	100	3.800.000,00	100	4.200.000,00		
2.17.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				7.918.500,00		8.200.000,00		8.400.000,00		8.600.000,00		8.800.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	100	100	7.918.500,00	100	8.200.000,00	100	8.400.000,00	100	8.600.000,00	100	8.800.000,00		
2.17.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				2.880.000,00		3.200.000,00		3.500.000,00		3.900.000,00		4.300.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	100	100	2.880.000,00	100	3.200.000,00	100	3.500.000,00	100	3.900.000,00	100	4.300.000,00		
2.17.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17.651.000,00		17.800.000,00		18.100.000,00		19.400.000,00		19.700.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	100	100	17.651.000,00	100	17.800.000,00	100	18.100.000,00	100	19.400.000,00	100	19.700.000,00		
2.17.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.880.000,00		13.100.000,00		13.400.000,00		13.700.000,00		14.100.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	100	100	12.880.000,00	100	13.100.000,00	100	13.400.000,00	100	13.700.000,00	100	14.100.000,00		
2.17.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1.000.000,00		1.100.000,00		1.200.000,00		1.300.000,00		1.400.000,00		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terselenggaranya Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	100	100	1.000.000,00	100	1.100.000,00	100	1.200.000,00	100	1.300.000,00	100	1.400.000,00		
2.17.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				100.000,00		1.100.000,00		1.200.000,00		1.300.000,00		1.400.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	100	100	100.000,00	100	1.100.000,00	100	1.200.000,00	100	1.300.000,00	100	1.400.000,00		
2.17.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.400.000,00		1.500.000,00		1.600.000,00		1.700.000,00		1.800.000,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	100	100	1.400.000,00	100	1.500.000,00	100	1.600.000,00	100	1.700.000,00	100	1.800.000,00		
2.17.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				0		0		0		0		0		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.01.0012 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu				0		0		0		0		0		
Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan				0		0		0		0		0		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				18.633.386.500,00		20.838.384.495,00		20.786.466.526,00		20.696.211.570,00		20.399.611.118,00		
Prosentase terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100	100	18.633.386.500,00	100	20.838.384.495,00	100	20.786.466.526,00	100	20.696.211.570,00	100	20.399.611.118,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	100	100		100		100		100		100			
2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				18.619.179.000,00		20.822.846.195,00		20.770.174.395,00		20.680.090.227,00		20.382.577.640,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100	100	18.619.179.000,00	100	20.822.846.195,00	100	20.770.174.395,00	100	20.680.090.227,00	100	20.382.577.640,00		
2.17.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.072.600,00		2.490.906,00		2.739.997,00		3.013.996,00		3.315.396,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	100	100	2.072.600,00	100	2.490.906,00	100	2.739.997,00	100	3.013.996,00	100	3.315.396,00		
2.17.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				9.051.000,00		9.406.029,00		9.746.632,00		9.121.295,00		9.533.425,00		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	100	100	9.051.000,00	100	9.406.029,00	100	9.746.632,00	100	9.121.295,00	100	9.533.425,00		
2.17.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				3.083.900,00		3.641.365,00		3.805.502,00		3.986.052,00		4.184.657,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	100	100	3.083.900,00	100	3.641.365,00	100	3.805.502,00	100	3.986.052,00	100	4.184.657,00		
2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				15.257.500,00		16.500.000,00		17.000.000,00		18.500.000,00		19.000.000,00		
Persentase aktifitas administrasi barang milik daerah yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	100	100	15.257.500,00	100	16.500.000,00	100	17.000.000,00	100	18.500.000,00	100	19.000.000,00		
2.17.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				15.257.500,00		16.500.000,00		17.000.000,00		18.500.000,00		19.000.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	100	100	15.257.500,00	100	16.500.000,00	100	17.000.000,00	100	18.500.000,00	100	19.000.000,00		
2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.000.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Terpenuhinya adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	100	100	2.000.000,00	100	2.500.000,00	100	2.500.000,00	100	2.500.000,00	100	2.500.000,00		
2.17.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2.000.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	100	100	2.000.000,00	100	2.500.000,00	100	2.500.000,00	100	2.500.000,00	100	2.500.000,00		
2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				610.395.129,00		613.700.000,00		617.800.000,00		621.900.000,00		626.300.000,00		
Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	100	100	610.395.129,00	100	613.700.000,00	100	617.800.000,00	100	621.900.000,00	100	626.300.000,00		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	100	100		100		100		100		100			
2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				33.696.929,00		34.100.000,00		34.600.000,00		35.200.000,00		35.500.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	100	100	33.696.929,00	100	34.100.000,00	100	34.600.000,00	100	35.200.000,00	100	35.500.000,00		
2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.940.000,00		17.000.000,00		18.000.000,00		19.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	100	100	15.940.000,00	100	17.000.000,00	100	18.000.000,00	100	19.000.000,00	100	20.000.000,00		
2.17.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				37.455.000,00		38.100.000,00		38.700.000,00		39.200.000,00		39.800.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	100	100	37.455.000,00	100	38.100.000,00	100	38.700.000,00	100	39.200.000,00	100	39.800.000,00		
2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				269.548.200,00		270.500.000,00		271.500.000,00		272.500.000,00		274.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	100	100	269.548.200,00	100	270.500.000,00	100	271.500.000,00	100	272.500.000,00	100	274.000.000,00		
2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				253.755.000,00		254.000.000,00		255.000.000,00		256.000.000,00		257.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100	100	253.755.000,00	100	254.000.000,00	100	255.000.000,00	100	256.000.000,00	100	257.000.000,00		
2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				195.796.805,00		428.822.400,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	100	100	195.796.805,00	100	428.822.400,00	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	100	100		100		100		100		100			
2.17.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				93.780.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	100	100	93.780.000,00	100	95.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00		
2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				102.016.805,00		333.822.400,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	100	100	102.016.805,00	100	333.822.400,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00		
2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.661.431.475,00		2.921.189.800,00		2.983.308.780,00		3.051.639.658,00		3.326.803.624,00		
Persentase terpenuhinya jasa penjunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	100	100	2.661.431.475,00	100	2.921.189.800,00	100	2.983.308.780,00	100	3.051.639.658,00	100	3.326.803.624,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	100	100		100		100		100		100			
2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				689.791.475,00		609.077.700,00		669.985.470,00		736.984.017,00		810.682.419,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	100	100	689.791.475,00	100	609.077.700,00	100	669.985.470,00	100	736.984.017,00	100	810.682.419,00		
2.17.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				11.136.000,00		12.112.100,00		13.323.310,00		14.655.641,00		16.121.205,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	100	100	11.136.000,00	100	12.112.100,00	100	13.323.310,00	100	14.655.641,00	100	16.121.205,00		
2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.960.504.000,00		2.300.000.000,00		2.300.000.000,00		2.300.000.000,00		2.500.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	100	100	1.960.504.000,00	100	2.300.000.000,00	100	2.300.000.000,00	100	2.300.000.000,00	100	2.500.000.000,00		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.198.991,00		110.218.890,00		121.240.779,00		133.364.857,00		146.701.343,00		
Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah yang dilaksanakan.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	100	100	100.198.991,00	100	110.218.890,00	100	121.240.779,00	100	133.364.857,00	100	146.701.343,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	100	100		100		100		100		100			
2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				45.748.991,00		50.323.890,00		55.356.279,00		60.891.907,00		66.981.098,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	100	100	45.748.991,00	100	50.323.890,00	100	55.356.279,00	100	60.891.907,00	100	66.981.098,00		
2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				54.450.000,00		59.895.000,00		65.884.500,00		72.472.950,00		79.720.245,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	100	100	54.450.000,00	100	59.895.000,00	100	65.884.500,00	100	72.472.950,00	100	79.720.245,00		
2.17.01.2.13 - Penataan Organisasi				169.473.600,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
TerlaksananyaPeningkatanKinerjadanReformasiBirokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	100	100	169.473.600,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00		
2.17.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				169.473.600,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	100	100	169.473.600,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00		
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Meningkatnya pelayanan izin usaha simpan pinjam	Persentase Verifikasi Syarat Usaha Simpan Pinjam yang Dikeluarkan (%)	0	10.000.000	10.000.000,00	10.000.000	10.000.000,00	10.000.000	10.000.000,00	10.000.000	10.000.000,00	10.000.000	10.000.000,00	2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan	
2.17.02.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Persentase jumlah izin usaha simpan pinjam	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	100	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00		
2.17.02.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	100	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00		
2.17.02.2.02 - Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Persentase jumlah kantor yang diberikan izin usaha simpan pinjam	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	100	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00		
2.17.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terfasilitasinya Pemenuhan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	100	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kabupaten/Kota (Unit Usaha)													
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				124.996.000,00		29.921.800,00		29.921.800,00		29.921.800,00		29.921.800,00		
Meningkatnya pengawasan terhadap koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	229.086.000	112.627.900	124.996.000,00	123.890.690	29.921.800,00	136.279.759	29.921.800,00	149.907.735	29.921.800,00	164.898.508	29.921.800,00	2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan	
2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				124.996.000,00		29.921.800,00		29.921.800,00		29.921.800,00		29.921.800,00		
Prosentase koperasi aktif	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	100	100	124.996.000,00	100	29.921.800,00	100	29.921.800,00	100	29.921.800,00	100	29.921.800,00		
	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	100	100		100		100		100		100			
2.17.03.2.01.0003 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				62.498.000,00		14.960.900,00		14.960.900,00		14.960.900,00		14.960.900,00		
Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	100	100	62.498.000,00	100	14.960.900,00	100	14.960.900,00	100	14.960.900,00	100	14.960.900,00		
2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				62.498.000,00		14.960.900,00		14.960.900,00		14.960.900,00		14.960.900,00		
Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	100	100	62.498.000,00	100	14.960.900,00	100	14.960.900,00	100	14.960.900,00	100	14.960.900,00		
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				25.000.000,00		14.855.600,00		14.855.600,00		14.855.600,00		14.855.600,00		
Meningkatnya koperasi sehat	Persentase Koperasi Sehat (%)	20.320.000	25.000.000	25.000.000,00	14.855.600	14.855.600,00	14.855.600	14.855.600,00	14.855.600	14.855.600,00	14.855.600	14.855.600,00	2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000,00		14.855.600,00		14.855.600,00		14.855.600,00		14.855.600,00		
Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penilaian Kesehatannya	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	100	100	25.000.000,00	100	14.855.600,00	100	14.855.600,00	100	14.855.600,00	100	14.855.600,00		
2.17.04.2.01.0003 - Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan				25.000.000,00		14.855.600,00		14.855.600,00		14.855.600,00		14.855.600,00		
Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	100	100	25.000.000,00	100	14.855.600,00	100	14.855.600,00	100	14.855.600,00	100	14.855.600,00		
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				264.500.000,00		120.653.600,00		120.653.600,00		120.653.600,00		120.653.600,00		
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas koperasi	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	287.649.000	1.442.941.412	264.500.000,00	1.587.235.553	120.653.600,00	1.745.959.109	120.653.600,00	1.920.555.019	120.653.600,00	2.112.610.521	120.653.600,00	2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan	
2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				264.500.000,00		120.653.600,00		120.653.600,00		120.653.600,00		120.653.600,00		
Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	100	100	264.500.000,00	100	120.653.600,00	100	120.653.600,00	100	120.653.600,00	100	120.653.600,00		
2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				264.500.000,00		120.653.600,00		120.653.600,00		120.653.600,00		120.653.600,00		
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	100	100	264.500.000,00	100	120.653.600,00	100	120.653.600,00	100	120.653.600,00	100	120.653.600,00		
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Meningkatnya koperasi berkualitas	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	25.000.000	25.000.000	25.000.000,00	25.000.000	25.000.000,00	25.000.000	25.000.000,00	25.000.000	25.000.000,00	25.000.000	25.000.000,00	2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan	
2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	100	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.06.2.01.0004 - Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	100	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00		
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				180.900.000,00		1.343.210.100,00		1.343.210.100,00		2.043.210.100,00		2.343.210.100,00		
Meningkatnya pemberdayaan usaha mikro	Persentase Usaha Mikro yang Difasilitasi Pemberdayaan (%)	76.000.000	180.900.000	180.900.000,00	1.343.210.100	1.343.210.100,00	1.343.210.100	1.343.210.100,00	2.043.210.100	2.043.210.100,00	2.343.210.100	2.343.210.100,00	2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan	
2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				180.900.000,00		1.343.210.100,00		1.343.210.100,00		2.043.210.100,00		2.343.210.100,00		
Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	100	100	180.900.000,00	100	1.343.210.100,00	100	1.343.210.100,00	100	2.043.210.100,00	100	2.343.210.100,00		
	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)	100	100		100		100		100		100			
2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				100.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.700.000.000,00		2.000.000.000,00		
Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	100	100	100.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.700.000.000,00	100	2.000.000.000,00		
2.17.07.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				80.900.000,00		343.210.100,00		343.210.100,00		343.210.100,00		343.210.100,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam	100	100	80.900.000,00	100	343.210.100,00	100	343.210.100,00	100	343.210.100,00	100	343.210.100,00		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)													
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				1.462.422.000,00		1.251.573.820,00		1.251.573.820,00		1.251.573.820,00		1.251.573.820,00		
Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Persentase Pertumbuhan UMKM (%)	1.727.815.000	1.462.422.000	1.462.422.000,00	1.251.573.820	1.251.573.820,00	1.251.573.820	1.251.573.820,00	1.251.573.820	1.251.573.820,00	1.251.573.820	1.251.573.820,00	2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan	
2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				1.462.422.000,00		1.251.573.820,00		1.251.573.820,00		1.251.573.820,00		1.251.573.820,00		
Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	100	100	1.462.422.000,00	100	1.251.573.820,00	100	1.251.573.820,00	100	1.251.573.820,00	100	1.251.573.820,00		
	Jumlah yang Difasilitasi (Orang)	100	100		100		100		100		100			
2.17.08.2.01.0002 - Pengembangan Usaha Mikro				731.211.000,00		625.786.910,00		625.786.910,00		625.786.910,00		625.786.910,00		
Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	100	100	731.211.000,00	100	625.786.910,00	100	625.786.910,00	100	625.786.910,00	100	625.786.910,00		
2.17.08.2.01.0003 - Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan				731.211.000,00		625.786.910,00		625.786.910,00		625.786.910,00		625.786.910,00		
Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan	Jumlah yang Difasilitasi (Orang)	100	100	731.211.000,00	100	625.786.910,00	100	625.786.910,00	100	625.786.910,00	100	625.786.910,00		
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				151.478.617.000,00		2.421.760.060,00		2.421.760.060,00		2.421.760.060,00		2.421.760.060,00		
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				4.000.000,00		6.301.000,00		6.301.000,00		6.301.000,00		6.301.000,00		
Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam mengurus perizinan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) (%)	10.000.000	11.000.000	4.000.000,00	12.100.000	6.301.000,00	13.310.000	6.301.000,00	14.641.000	6.301.000,00	16.105.100	6.301.000,00	2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan	
3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				4.000.000,00		6.301.000,00		6.301.000,00		6.301.000,00		6.301.000,00		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Jumlah Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	100	100	4.000.000,00	100	6.301.000,00	100	6.301.000,00	100	6.301.000,00	100	6.301.000,00		
3.30.02.2.06.0003 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				4.000.000,00		6.301.000,00		6.301.000,00		6.301.000,00		6.301.000,00		
Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	100	100	4.000.000,00	100	6.301.000,00	100	6.301.000,00	100	6.301.000,00	100	6.301.000,00		
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				150.955.000.000,00		1.049.300.060,00		1.049.300.060,00		1.049.300.060,00		1.049.300.060,00		
Meningkatnya kualitas sarana distribusi perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Direhabilitasi (%)	1.430.000.000	150.955.000.000	150.955.000.000,00	1.049.300.060	1.049.300.060,00	1.049.300.060	1.049.300.060,00	1.049.300.060	1.049.300.060,00	1.049.300.060	1.049.300.060,00	2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan	
3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				150.000.000.000,00		955.000.000,00		955.000.000,00		955.000.000,00		955.000.000,00		
Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	17	1	150.000.000.000,00	16	955.000.000,00	16	955.000.000,00	16	955.000.000,00	16	955.000.000,00		
3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				150.000.000.000,00		955.000.000,00		955.000.000,00		955.000.000,00		955.000.000,00		
Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	17	1	150.000.000.000,00	16	955.000.000,00	16	955.000.000,00	16	955.000.000,00	16	955.000.000,00		
3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				955.000.000,00		94.300.060,00		94.300.060,00		94.300.060,00		94.300.060,00		
Jumlah Dokumen Hasil pembinaan dan Pengendalian kepada pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	17	16	955.000.000,00	17	94.300.060,00	17	94.300.060,00	17	94.300.060,00	17	94.300.060,00		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				955.000.000,00		94.300.060,00		94.300.060,00		94.300.060,00		94.300.060,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	17	16	955.000.000,00	17	94.300.060,00	17	94.300.060,00	17	94.300.060,00	17	94.300.060,00		
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				293.000.000,00		790.136.000,00		790.136.000,00		790.136.000,00		790.136.000,00		
Meningkatnya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	5.000.000	5.500.000	293.000.000,00	6.050.000	790.136.000,00	6.655.000	790.136.000,00	7.320.500	790.136.000,00	8.052.550	790.136.000,00	2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan	
3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				73.250.000,00		197.534.000,00		197.534.000,00		197.534.000,00		197.534.000,00		
Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	100	100	73.250.000,00	100	197.534.000,00	100	197.534.000,00	100	197.534.000,00	100	197.534.000,00		
3.30.04.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				73.250.000,00		197.534.000,00		197.534.000,00		197.534.000,00		197.534.000,00		
Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	100	100	73.250.000,00	100	197.534.000,00	100	197.534.000,00	100	197.534.000,00	100	197.534.000,00		
3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				146.500.000,00		395.068.000,00		395.068.000,00		395.068.000,00		395.068.000,00		
Jumlah kegiatan operasi pasar reguler dan khusus	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	100	100	146.500.000,00	100	395.068.000,00	100	395.068.000,00	100	395.068.000,00	100	395.068.000,00		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	100	100		100		100		100		100			
3.30.04.2.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				73.250.000,00		197.534.000,00		197.534.000,00		197.534.000,00		197.534.000,00		
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	100	100	73.250.000,00	100	197.534.000,00	100	197.534.000,00	100	197.534.000,00	100	197.534.000,00		
3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				73.250.000,00		197.534.000,00		197.534.000,00		197.534.000,00		197.534.000,00		
Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	100	100	73.250.000,00	100	197.534.000,00	100	197.534.000,00	100	197.534.000,00	100	197.534.000,00		
3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				73.250.000,00		197.534.000,00		197.534.000,00		197.534.000,00		197.534.000,00		
Jumlah pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi (Laporan)	100	100	73.250.000,00	100	197.534.000,00	100	197.534.000,00	100	197.534.000,00	100	197.534.000,00		
3.30.04.2.03.0002 - Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				73.250.000,00		197.534.000,00		197.534.000,00		197.534.000,00		197.534.000,00		
Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi (Laporan)	100	100	73.250.000,00	100	197.534.000,00	100	197.534.000,00	100	197.534.000,00	100	197.534.000,00		
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				114.710.000,00		168.713.300,00		168.713.300,00		168.713.300,00		168.713.300,00		
Meningkatnya pelaku usaha yang melakukan ekspor	Cakupan Pelaku Usaha yang Memiliki Potensi Ekspor (%)	250.000.000	114.710.000	114.710.000,00	168.713.300	168.713.300,00	168.713.300	168.713.300,00	168.713.300	168.713.300,00	168.713.300	168.713.300,00	2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				114.710.000,00		168.713.300,00		168.713.300,00		168.713.300,00		168.713.300,00		
Jumlah Pelaku Usaha terfasilitasi pada Pameran Dagang Nasional/Lokal	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)	11	11	114.710.000,00	11	168.713.300,00	11	168.713.300,00	11	168.713.300,00	11	168.713.300,00		
	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	15	15		15		15		15		15			
	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	15	15		15		15		15		15			
3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional				40.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	15	15	40.000.000,00	15	60.000.000,00	15	60.000.000,00	15	60.000.000,00	15	60.000.000,00		
3.30.05.2.01.0003 - Pameran Dagang Lokal				40.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	15	15	40.000.000,00	15	60.000.000,00	15	60.000.000,00	15	60.000.000,00	15	60.000.000,00		
3.30.05.2.01.0005 - Peningkatan Citra Produk Ekspor				34.710.000,00		48.713.300,00		48.713.300,00		48.713.300,00		48.713.300,00		
Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)	11	11	34.710.000,00	11	48.713.300,00	11	48.713.300,00	11	48.713.300,00	11	48.713.300,00		
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				39.000.000,00		24.110.000,00		24.110.000,00		24.110.000,00		24.110.000,00		
Meningkatnya perlindungan konsumen	Persentase Alat - Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku (%)	69.000.000	39.000.000	39.000.000,00	24.110.000	24.110.000,00	24.110.000	24.110.000,00	24.110.000	24.110.000,00	24.110.000	24.110.000,00	2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan	
3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				39.000.000,00		24.110.000,00		24.110.000,00		24.110.000,00		24.110.000,00		
Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	36	36	39.000.000,00	36	24.110.000,00	36	24.110.000,00	36	24.110.000,00	36	24.110.000,00		
	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	1.200	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200			

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang				19.500.000,00		12.055.000,00		12.055.000,00		12.055.000,00		12.055.000,00		
Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	1.200	1.200	19.500.000,00	1.200	12.055.000,00	1.200	12.055.000,00	1.200	12.055.000,00	1.200	12.055.000,00		
3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal				19.500.000,00		12.055.000,00		12.055.000,00		12.055.000,00		12.055.000,00		
Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	36	36	19.500.000,00	36	12.055.000,00	36	12.055.000,00	36	12.055.000,00	36	12.055.000,00		
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				72.907.000,00		383.199.700,00		383.199.700,00		383.199.700,00		383.199.700,00		
Meningkatnya pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	438.613.000	482.474.300	72.907.000,00	530.721.730	383.199.700,00	583.793.903	383.199.700,00	642.173.293	383.199.700,00	706.390.623	383.199.700,00	2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan	
3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				72.907.000,00		383.199.700,00		383.199.700,00		383.199.700,00		383.199.700,00		
Jumlah UMKM yang pelaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	20	20	72.907.000,00	20	383.199.700,00	20	383.199.700,00	20	383.199.700,00	20	383.199.700,00		
3.30.07.2.01.0006 - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				72.907.000,00		383.199.700,00		383.199.700,00		383.199.700,00		383.199.700,00		
Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	20	20	72.907.000,00	20	383.199.700,00	20	383.199.700,00	20	383.199.700,00	20	383.199.700,00		

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha mikro yang difasilitasi pemberdayaan	Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Bantuan modal usaha untuk UMKM
			Pengembangan Usaha Mikro	

Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang

Dalam rangka mewujudkan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang berupa bantuan modal usaha untuk UMKM yang selaras dengan Misi Kabupaten Pemalang Tahun 2025 -2029 yaitu Misi ke-5 Silaturahmi yaitu ***"meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera"*** yang ***bertujuan meningkatkan perlindungan sosial masyarakat dan penanggulangan kemiskinan*** dengan ***sasaran menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat***, maka kegiatan tersebut dilaksanakan pada Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang.

4.5 Proyeksi Pendapatan Retribusi Pasar Dinas Koperasi Usaha mikro kecil dan menengah dan Perdagangan dari tahun 2026 – 2030

Dalam rangka meningkatkan kemandirian fiskal daerah serta mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang menetapkan proyeksi target pendapatan dari sektor retribusi pasar pada periode tahun 2026–2030. Proyeksi ini didasarkan pada potensi pasar tradisional yang terus berkembang, meningkatnya aktivitas perdagangan lokal, serta adanya upaya penataan dan modernisasi pasar rakyat agar lebih representatif, bersih, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Pada tahun 2026, target pendapatan retribusi pasar diproyeksikan mulai dengan capaian yang realistis sesuai kondisi fiskal daerah dan kapasitas pasar yang ada. Seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan pasar, perbaikan

https://jdih.pemalangkab.go.id

infrastruktur, serta optimalisasi sistem penarikan retribusi berbasis digital, target pendapatan pada tahun 2027 dan 2028 diarahkan untuk mengalami kenaikan secara bertahap. Pertumbuhan target ini juga memperhatikan proyeksi peningkatan jumlah pedagang, aktivitas jual-beli, serta dinamika harga komoditas.

Memasuki tahun 2029 dan 2030, target pendapatan retribusi pasar diproyeksikan meningkat lebih signifikan sejalan dengan bertambahnya pasar yang ditata dan direvitalisasi, serta semakin kuatnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi. Penerapan sistem retribusi yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi diharapkan mampu meminimalisasi kebocoran serta memperkuat kontribusi sektor perdagangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan demikian, proyeksi target pendapatan retribusi pasar pada periode 2026–2030 diharapkan tidak hanya meningkatkan kemandirian fiskal daerah, tetapi juga menjadi instrumen pengungkit bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Peningkatan target ini didukung oleh kebijakan strategis berupa penataan pasar, peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola pasar, serta inovasi pelayanan yang berorientasi pada kenyamanan pedagang dan masyarakat.

Proyeksi target pendapatan retribusi pasar dihitung dari realisasi PAD retribusi pasar pada Dinas Koperasi Usaha mikro kecil dan menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang tahun 2024 dibagi realisasi PAD retribusi daerah tahun 2024 (RPJMD) dikali Proyeksi target Kerangka Pendapatan Kabupaten Pemalang dari Tahun 2026-2030 di RPJMD, tersaji pada tabel 4.4 dibawah ini :

Tabel 4.4
Proyeksi Pendapatan Retribusi Pasar Dinas Koperasi Usaha mikro kecil dan menengah dan Perdagangan dari tahun 2026 – 2030

No.	Uraian	Baseline	Proyeksi Target Pendapatan Retribusi Pasar				
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Retribusi Pasar	11.000.000.000	9.605.931.607	10.182.287.503	10.691.401.857	11.119.057.919	11.452.629.656

Kenaikan target pendapatan retribusi pasar pada periode lima tahun ini mencerminkan strategi bertahap yang realistis namun progresif. Tahun 2026 menjadi landasan awal dengan capaian yang menyesuaikan kondisi eksisting. Pada tahun 2027–2028, optimalisasi sistem penarikan dan perbaikan infrastruktur pasar diproyeksikan meningkatkan pendapatan secara signifikan. Selanjutnya, pada tahun 2029–2030, target diarahkan lebih agresif dengan

https://jdih.pemalangkab.go.id

dukungan penataan kelembagaan, penguatan pengelolaan pasar, serta penerapan penuh sistem digitalisasi yang transparan dan akuntabel.

Dengan strategi tersebut, pendapatan retribusi pasar diharapkan tidak hanya meningkat secara nominal, tetapi juga memberikan manfaat luas bagi pembangunan daerah serta mendukung kesejahteraan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Pemalang.

4.6 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025- 2029

Rincian target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang pada tabel 4.5 di bawah ini.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD (Tujuan, dan/atau Sasaran)

TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR		Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Keterangan
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Kondisi Akhir
Meningkatnya sektor Koperasi, UMKM, dan Perdagangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi lokal			1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	0,2	0,2	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	1,10
			2	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,41	2,91	3,41	3,19	4,41	4,91	5,41	18,83
			3	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	17,08	17,58	17,50	17,59	17,60	18,11	18,03	18,12
	1	Meningkatnya volume usaha koperasi terhadap PDRB	1	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,56	1,56	1,57	1,58	1,59	1,6	1,61	7,90
	2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	2	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	22,39	32,22	32,72	33,22	33,72	34,22	34,72	34,22
	3	Meningkatnya nilai ekspor	3	Nilai Ekspor	$	335.735.267	352.522.031	370.148.132	388.655.539	408.088.316	428.492.732	449.917.368	428.492.732
	4	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	4	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Angka	4,54	4,54	4,54	4,6	4,65	4,7	4,75	4,8

Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dan link RPJMD yang sudah disepakati

➔ Dengan rincian target tersebut, diharapkan pada tahun 2030 Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang mampu menjadi penggerak utama perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan, yang ditandai dengan koperasi sehat, UMKM berdaya saing, serta sistem perdagangan yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.7 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan PD tahun 2025-2029

Target kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang melalui Indikator Kinerja Kunci dapat dilihat tabel di bawah ini.

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target					Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	228,29	0,84	0,86	0,88	0,9	0,92	0,94	
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	22,39	32,22	32,72	33,22	33,72	34,22	34,72	
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	7,87	7,87	08.15	08.43	0,383	09.14	09.28	
6	Disparitas Harga	%	0,05	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10	IUP

Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dan *link* RPJMD yang sudah disepakati

Dengan memproyeksikan target indikator kinerja kunci tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang menargetkan terwujudnya kelembagaan koperasi yang sehat, UMKM yang berdaya saing, pasar rakyat yang modern, serta perdagangan yang berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Target kinerja ini sekaligus menjadi pedoman dalam pengelolaan program dan kegiatan selama periode perencanaan pembangunan, dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi masyarakat.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai pedoman dalam mewujudkan arah pembangunan daerah di bidang koperasi, UMKM, dan perdagangan. Penyusunan Renstra ini berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029 serta selaras dengan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan nasional.

Renstra ini menjadi instrumen strategis dalam mengarahkan upaya pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, pemberdayaan dan penguatan daya saing UMKM, serta pengembangan perdagangan yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah, ekspor, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai acuan operasional dalam pembangunan sektor ekonomi kerakyatan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

5.2. Kaidah Pelaksanaan dan Masa Transisi

Dalam pelaksanaan Renstra ini akan dilakukan upaya pengendalian melalui penerapan manajemen risiko khususnya menyangkut efektivitas mitigasi risiko strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang. Selain itu, akan dilakukan evaluasi pelaksanaan Renstra ini minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) tahun 2026 sampai dengan tahun 2029, dan menjadi pedoman penyusunan Renja pada tahun 2030 sebagai tahun transisi, untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta mengisi kekosongan Renja setelah Renstra berakhir.

Dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya yang dimiliki, Renstra ini telah disusun dengan harapan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tantangan perkembangan lingkungan strategis, baik intern organisasi maupun di lingkup Kabupaten Pemalang demi terwujudnya

https://jdih.pemalangkab.go.id

perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029 ini disusun sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah pada sektor koperasi, UMKM, dan perdagangan.

Diharapkan seluruh pihak yang berkepentingan dapat menjadikan dokumen ini sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi program dan kegiatan secara konsisten, terintegrasi, dan berkesinambungan demi terwujudnya Kabupaten Pemalang yang sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan.

https://

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan undang undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah baik yang bersifat jangka panjang, menengah maupun pendek. Undang-Pundang ini mengamanatkan setiap daerah harus menyusun perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari RPJP, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja OPD dan RKPD.

Perencanaan Strategi Instansi dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra PD. Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun. Sedangkan sesuai pasal 272 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi, Perindustrian dan Trsnsmigarsi Kabupaten Pemalang merupakan penggabungan dari Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi dan satu urusan perindustrian yang semula berada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Perindustrian, Perdagangan. Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi, Perindustrian dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Transmigrasi di Kabupaten Pemalang.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 disusun berpedoman kepada Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Janagka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dalam penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah memuat tujuan, isu Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta sub kegiatan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Perumusan RENSTRA PD dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung Pemerintah Daerah yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renstra disusun berdasarkan Tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Tahapan penyusunan rancangan renstra dapat digambarkan dalam bagian alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

Renstra memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis, renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja

Berdasarkan hal tersebut di atas, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 yang mengacu pada agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029. Selain sebagai bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan di atas, juga didasarkan kepada kebutuhan pembangunan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi, Perindustrian dan Transmigrasi untuk mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Pemalang.

1.2. Dasar Hukum Pemyusunan

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskrimanasi Terhadap Wanita;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (

https://jdih.pemalangkab.go.id

Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)
7. Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengerustamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang kodefikasi, klasifikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

https://jdih.pemalangkab.go.id

16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Janagka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2039;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 25).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang, adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah.
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang serta para pihak terkait dalam pembanagunan di bidanag ketenagakerjaan.
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang.
4. Sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang 2025-2029 didasarkan pada Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

1.1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasikan dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 serta disusun sesuai kaidah penyusunan produk hukum.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

1.4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggungjawab Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Menyajikan tugas, fungsi dan struktur Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang

2.1.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

Menyajikan data-data dan informasi sumberdaya DPMPTSP Kabupaten Pemalang yang meliputi sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menyajikan data-data dan informasi pelayanan yang menjadi urusan dan tanggung jawab Dinas

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Mengidentifikasikan masyarakat yang terlibat dalam urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, Perindustrian dan transmigrasi.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian PelayananMengidentifikasikan Perangkat Daerah yang terilbat dalam rangka meningkatkan kemudahan dan kecepatan didalam pemberian pelayanan perizinan kepada masyarakat.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Mengidentifikasikan permasalahan dan isu strategis yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang.

2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah

Mengidentifikasikan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang

2.2.2. Isu Strategis

Mengidentifikasikan isu strategis sesuai lingkungan dinamis yang dapat mempengaruhi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang baik secara langsung maupun tidak langsung

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menyajikan tujuan, sasaran dan arah kebijakan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Menentukan tujuan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang berdasarkan NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Menentukan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang berdasarkan NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat

https://jdih.pemalangkab.go.id

3.3. Strategi Perangkat Daerah
Menentukan strategi Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang berisi tindakan yang komprehensif yang akan dilakukan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah
Menyajikan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tuga dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menyajikan program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan ketenagakerjaan, perindustrian dana transmigrasi

4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Menyajikan program, kegiatan dan subkegiatan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output.

4.2. Uraian Subkegiatan Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Menyajikan uraian subkegiatan prioritas yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi pedoman pembangunan daerah dan dapat diterjemahkan menjadi aksi-aksi nyata yang dapat diimplementasikan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, Kabupaten Pemalang.

4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Menyajikan indikator kinerja utama atau IKU Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta menjadikan IKU tersebut sebagai prioritas utama

4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Menyajikan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang

BAB V PENUTUP

Menyajikan kesimpulan penting subtansial, kaidah pelaksanaan serta pelaksanaan pengendalian evaluasi

https://jdih.pemalangkab.go.id

5.1. Kesimpulan Penting Subtansial

Menyajikan kesimpulan penting substansial Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Menyajikan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

5.3. Pelaksanaan Pengendalian Evaluasi

Menyajikan Pelaksanaan pengendalian evaluasi Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 bertujuan untuk memastikan pencapaian target program dan kegiatan, menilai kinerja serta mengendalikan risiko strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi, Perindustrian dan Transmigrasi

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, menyebutkan bahwa Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

B. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi serta pembinaan hubungan industrial, syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi serta pembinaan hubungan industrial, syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan tenaga kerja,pelatihan dan transmigrasi serta pembinaan hubungan industrial, syarat kerja dan jaminan social tenaga kerja;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, maka struktur Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang terdiri dari:

a. Kepala Dinas

Tugas:

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi, bidang pembinaan hubungan industrial, serta bidang perindustrian;

https://jdih.pemalangkab.go.id

2. pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi, bidang pembinaan hubungan industrial, serta bidang perindustrian;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi,bidang pembinaan hubungan industrial, serta bidang perindustrian;
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Tugas:

melaksanakan mengoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi.

Fungsi:

1. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
2. penyiapan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
3. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
4. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
5. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
6. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
7. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan, Produktivitas dan Transmigrasi

Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi; dan
2. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Tugas:

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan hubungan industrial, syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

Fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan hubungan industrial, syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja; dan
2. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Perindustrian

Tugas:
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian.
Fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian; dan
2. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. UPTD BLK

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi dalam menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja.
BLK mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja yang berbasis kewirausahaan;
2. Pemasaran program pelatihan tenaga kerja;
3. Penyelenggaraan uji kompetensi dan bursa kerja khusus.

https://jdih.pemalangkab.go.id

C. Struktur Organisasi

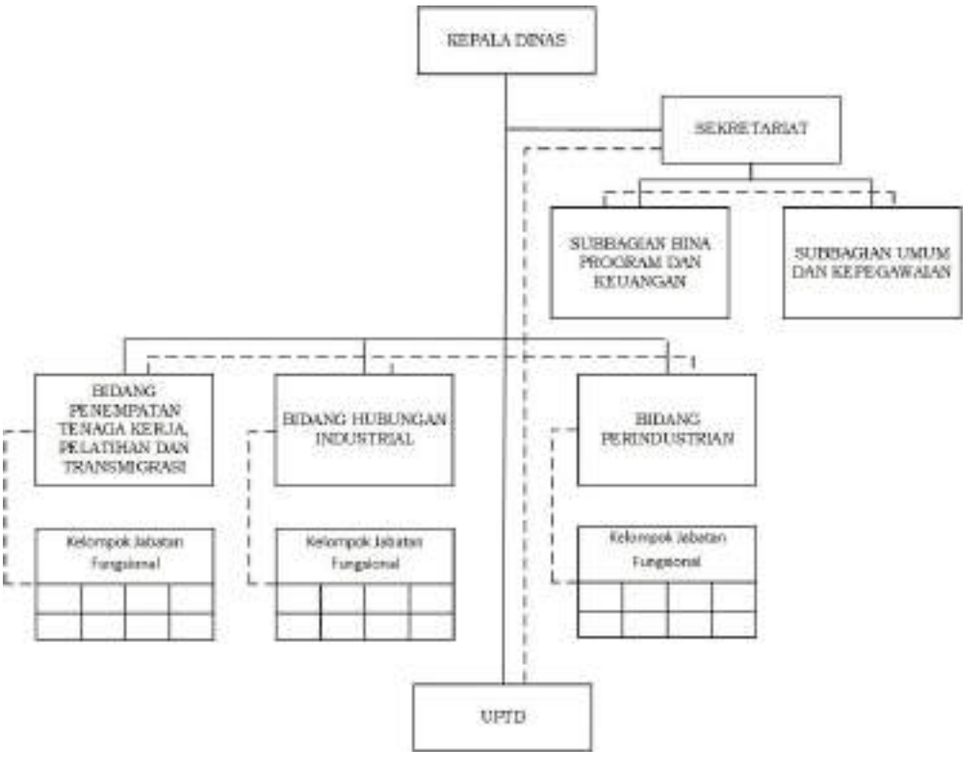

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi, Transmigrasi Kab. Pemalang

2.1.2. Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang pada tahun 2025 sebanyak 50 orang dengan perincian sebagai berikut :

A. Sumber Daya Manusia Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Berdasarkan Tingkat Golongan

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Golongan I	2	-	2
2	Golongan II	9	1	10
3	Golongan III	18	16	34
4	Golongan IV	4	-	4
	Jumlah	**33**	**17**	**50**

Sumber Data : DTKP Kabupaten Pemalang tahun 2026

https://jdih.pemalangkab.go.id

2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Pascasarjana (S2)	2	2	0
2.	Sarjana (S1)	33	19	14
3.	Sarjana Muda (D3/D4)	6	4	2
4.	SMA	7	6	1
5.	SMP	1	1	0
6.	SD	1	1	0
Jumlah		50	33	17

Sumber Data : DTKPT Kabupaten Pemalang tahun 2026

3. Jumlah Pegawai Yang mengikuti Diklat dan Pelatihan-pelatihan/bintek

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Berdasarkan Diklat Struktural

NO.	Jenis Diklat/Bimtek/Sosialisasi	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Diklatpim Tk. II	1	1	-
2.	Diklatpim Tk. III	2	2	-
3.	Diklatpim Tk. IV	5	3	2
4.	Diklat Dasar Instruktur	4	2	2

Sumber Data : DTKP Kabupaten Pemalang tahun 2025

Adapun keadaan aset dan perlengkapan untuk mendukung kegiatan, secara garis besar antara lain :

B. Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi

DAFTAR ASET
DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2025

Tabel 2.4
Aset dan Sarana Prasarana Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Per 31 Desember 2025

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI	
			RUSAK	BAIK
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	**ALAT BESAR**			
	- alat pengangkat lainnya (dst)	2		2
	- Portable Generating Set	1		1
	- pompa lainnya (dst)	8		8
2	**KOMPUTER**			
	-Komputer Jaringan lainnya	1		1
	-P.C Unit	58		58
	-Lap Top	44		44
	-CPU (Peralatan Mainframe)	1		1

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI	
			RUSAK	BAIK
	-Hard Disk	6		6
	-Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2	2	
	-Speaker Komputer	1		1
	-CPU (Peralatan Personal Komputer)	2		2
	-Monitor	2	2	
	-Printer (Peralatan Personal Komputer)	59	9	50
	-Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2		2
	-Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	1		1
	-Peralatan Personal Komputer lainnya	1		1
	-Server		2	2
	-Router		1	1
	-Hub		1	1
	-Peralatan Jaringan lainnya		1	1
3	**ALAT ANGKUTAN**			
	- Station Wagon		7	7
	•Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)		1	1
	•Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)		1	1
	•Pick Up		1	1
	- Sepeda Motor	2	18	20
	- kendaraan tak bermotor angkutan barang lainnya (dst)		3	3
4	**ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR**			
	- Mesin Bor	1		1
	- Mesin Gerinda	1	2	3
	- Mesin Jahit Kulit	10	2	12
	- Mesin Kompresor	2	2	4
	- Mesin Las Listrik		3	3
	- Mesin Pelubang (Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi)		1	1
	- Mesin Gerinda Tangan	1		1
	- Battery Charge	1		1
	- perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	13		13
	- perkakas bengkel service lainnya (dst)	5	15	20
	- perkakas pengangkat bermesin lainnya (dst)		1	1
	- Mesin Bor Kayu		1	1
	- Peralatan Las Listrik	7	6	13
	- peralatan las lainnya (dst)		22	22
	- Tabung NH3	1		1
	- perkakas bengkel konstruksi logam lainnya (dst)	17	10	27
	- perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	2		2
	- perkakas bengkel service lainnya (dst)	11	12	23
	- Tool Kit Box		8	8
	- Engine Stand	11	5	16
	- perkakas standard (standard tools) lainnya (dst)		6	6
	- Digital Tang Ampere		8	8
	- perkakas bengkel kerja lainnya (dst)	6		6
	- Kunci Pas		8	8
	- Drei Biasa (Obeng)		8	8
	- peralatan tukang besi lainnya (dst)	1		1
	- alat bengkel tak bermesin lainnya lainnya (dst)		16	16
	- Multi Meter		16	16
	- alat ukur universal lainnya (dst)	1	1	2
	- Scanner (Universal Tester)		1	1
	- Termometer Standar		1	1
	- Tool Set		1	1
5	**ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA**			

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI	
			RUSAK	BAIK
	- Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	6		6
	- Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	3		3
	- Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	1		1
	- Mesin Fotocopy Double Folio		1	1
	- Lemari Besi/Metal		8	8
	- Lemari Kayu		30	30
	- Rak Besi		8	8
	- Rak Kayu	2	4	6
	- Filing Cabinet Besi		15	15
	- Lemari Kaca		3	3
	- CCTV Camera Control Television System		1	1
	- Papan Visual/Papan Nama		1	1
	- White Board		2	2
	- Alat Penghancur Kertas		3	3
	- Mesin Absensi	1	3	4
	- Overhead Projector	1	3	4
	- Papan Nama Instansi		5	5
	- Papan Pengumuman		5	5
	- Papan Tulis		3	3
	- Alat Kantor Lainnya	15	14	29
	- Meja Kerja Besi/Metal	1	1	2
	- Meja Kerja Kayu		23	23
	- Kursi Besi/Metal		9	9
	- Kursi Kayu	33	24	57
	- Meja Rapat		5	5
	- Tempat Tidur Besi	20		20
	- Meja Sekolah		50	50
	- Meja 1/2 Biro	1		1
	- Kursi Putar	6	4	10
	- Bangku Tunggu	1	1	2
	- Kursi Lipat		210	210
	- Meja Komputer		17	17
	- Sofa	4		4
	- Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner		2	2
	- Mesin Pemotong Rumput	1	1	2
	- Lemari Es		3	3
	- A.C. Window	10	17	27
	- A.C. Split		19	19
	- Kompor Gas (Alat Dapur)		2	2
	- Oven Listrik		5	5
	- Tabung Gas	5		5
	- Kompor Kompresor	3		3
	- Rak Piring Alumunium		1	1
	- Mixer		2	2
	- Oven Gas		2	2
	- Alat Dapur lainnya	11	7	18
	- Televisi	5	2	7
	- Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1		1
	- Amplifier		1	1
	- Loudspeaker		1	1
	- Sound System		7	7
	- Wireless		8	8
	- Unit Power Supply		8	8
	- Camera Video		4	4
	- Mesin Jahit	74	24	98
	- Timbangan Barang		1	1
	- Tiang Bendera		1	1
	- Seterika	1		1
	- Tangga Aluminium		4	4
	- Dispenser	1	6	7
	- Mimbar/Podium		2	2

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI	
			RUSAK	BAIK
	- Coffee Maker		1	1
	- Juiser		1	1
	- Handy Cam		2	2
	- Lemari Plastik		1	1
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	10		10
	- Alat Pemadam/Portable		16	16
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II		1	1
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III		4	4
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural		7	7
	- Meja Kerja Pejabat lain-lain		4	4
	- Meja Tamu Biasa		1	1
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1		1
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	1	5
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8	6	14
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural		4	4
	- Kursi Kerja Pejabat lainnya		5	5
	- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II		1	1
	- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	4		4
	- Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota		1	1
	- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis		5	5
6	**ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR**			
	- Camera Electronic	1		1
	- Camera Film		1	1
	- Layar Film/Projector		4	4
	- Camera Digital		1	1
	- Alat Studio Video Lainnya		1	1
	- Rambu/Bak Ukur		1	1
	- Pesawat Telephone	2		2
	- Telephone Mobile		4	4
	- Genset		1	1
7	**ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN**			
	- Alat Kedokteran umum lainnya	3		3
	- alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)		1	1
8	**ALAT LABORATORIUM**			
	- Dial & Test Indikator		1	1
	- Blender		3	3
	- Vacum Pump		8	8
	- Meja Kerja Stainless		2	2
	- Hand Roll Machine	1		1
	- Mesin Overdeck	1		1
	- Mesin Strika Uap	2		2
	- Mesin Bordir Highspeed	1		1
	- Mesin Jahit Pasang Kancing	1		2
	- alat peraga kejuruan lainnya (dst)		4	4

Sumber Data : Disnaker Kabupaten Pemalang tahun 2025

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang

Gambaran umum terhadap pelayanan yang akan dijabarkan adalah gambaran umum terhadap pelayanan pada Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian selama kurun waktu 5 tahunan (tahun 2021-2024), sebagai berikut :

A. Bidang Ketenagakerjaan

Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Pemalang masih dihadapkan pada berbagai permasalahan mendasar yang memerlukan perhatian dan keterpaduan dalam penanganan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Masalah pokok ketenagakerjaan adalah adanya kesenjangan antara angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia, sehingga menyebabkan pengangguran. Perkembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Pemalang selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Periode Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,64	6,71	6,63	6,55	6,63
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	65,57	67,9	69,91	69,58	72,24
3.	Jumlah angkatan kerja	638.570	645.103	687.625	817.491	859.852
4.	Jumlah pengangguran	48.784	43.288	45.587	53.586	57.020
5.	Jumlah pencari kerja	15.307	13.077	12.171	11.903	12.381
6.	Jumlah Bursa Kerja Khusus	60	60	62	61	63
7.	Permasalahan/kasus PMI		14	26	29	23

Pada tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami kenaikan kenaikan sebesar 7,64% disebabkan karena ada wabah covid 19 Dengan adanya pandemi covid 19 banyak perusahaan melakukan PHK terhadap karyawannya; Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 6,71%, Angka TPT tahun 2021 sudah lebih baik dari angka TPT tahun yang lalu, jumlah pengangguran berkurang dikarenakan perusahaan-perusahaan mulai beroperasi kembali setelah adanya pandemi covid 19 setelah sebelumnya pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan sosial masyarakat sehingga aktivitas masyarakat sangat terbatas. Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,08% menjadi sebesar 6,63% banyak perusahaan memperluas usahanya dan membuka lapangan kerja baru sedangkan untuk tahun 2023 menurun 0,08% menjadi sebesar 6,55% masuknya investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, mendorong penciptaan lapangan kerja baru tetapi pada tahun 2024 mengalami kenaikan 0,08% menjadi 6,63%. pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan lapangan pekerjaan, yang mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan ketersediaan pekerjaan

Tahun 2020 Indikator prosentase tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Pemalang sebesar 7,64 % merupakan hasil dari jumlah penganggur sebesar 48.784 dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja sebesar 638.570. Pada tahun 2021 TPT sebesar 6,71% yang merupakan hasil dari jumlah penganggur sebesar 43.288 orang dibandingkn dengan jumlah Angkatan kerja sebesar 645.103 orang, sedangkan untuk tahun 2022 prosentase tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Pemalang sebesar 6,63% yang merupakan hasil dari jumlah penganggur 45,587 orang dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja sebesar

https://jdih.pemalangkab.go.id

687.625 orang, untuk tahun 2023 prosentase tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,55% yanag merupakan hasil dari jumlah penganggur bertambah sebesar 53.586 orang dan jumlah angkatan kerja sebesar 817.491 orang. Jumlah penganggur berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja karena Penduduk Usia kerja juga bertambah. Dengan naiknya investasi di Kabupaten Pemalang sangat berpengaruh pada banyaknya lapangan kerja baru. Banyak lapangan usaha usaha dan pekerjaan baru bermunculan yang membuat angka TPT turun.

Sedangkan Tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami kenaikan kembali sebesar 0,08% menjadi 6,63%.

Capaian angka ini tidak hanya didukung oleh Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang juga perlu didukung oleh OPD lain dan stakeholder dalam penurunan angka pengangguran.

Beberapa upaya yang harus dilakukan adalah :

1. Mendorong pertumbuhan investasi melalui program padat karya;
2. Peningkatan kualitas dan produktifitas SDM tenaga kerja melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di dunia industri dan dunia usaha;
3. Mendororng pertumbuhan dan perkembangan UMKM serta penciptaan wirausaha baru;
4. Menyelenggarakan bursa tenaga kerja / job fair dan pencarian informasi lowongan kerja / job canvasing;
5. Mendorong penyiapan tenaga kerja siap pakai melalui program pemagangan;
6. Menyebarluaskan informasi dan peluang kerja di luar negeri;
7. Mengadakan sosialisasi, pembinaan dan monev tentang peraturan ketenagakerjaan dan standar Upah.

Jumlah angkatan kerja Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami flukturatif dari tahun ke tahun mulai tahun 2021 ke tahun 2022 bertambah sebesar 6,59%, tahun 2022 ke 2023 bertambah sebesar 18,9%, tahun 2023 ke 2024 bertambah 5,18%.

Sedangkan untuk jumlah pencari kerja selama kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif.

Upaya perluasan kesempatan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran terus dilakukan antara lain melalui penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri, penyelenggaraan bursa tenaga kerja dan pengembangan informasi tenaga kerja. Sedangkan upaya peningkatan dan produktifitas tenaga kerja dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan kerja dan pemagangan.

Di Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang ada 2 jenis pelatihan yaitu :

https://jdih.pemalangkab.go.id

1. Pelatihan Berbasis Kompetensi adalah jens pelatihan yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja yang bertujuan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk melakukan tugas kerja tertentu secara efektif, bukan hanya pada teori atau waktu belajar. Ditujukan kepada pencari kerja.
2. Pelatihan Berbasis Masyarakat/kewirausahaan bertujuan untuk menciptakan wirausaha baru

Tabel 2.6.
Data Jumlah Peserta Pelatihan dan LPKS
Periode Tahun 2020-2024

No.	Jenis Pelatihan	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Berbasis Kompetensi	160	128	208	320	576
2.	Berbasis Masyarakat	140	280	100	212	180
3.	Jumlah LPKS	39	43	50	44	41

Tabel 2.7.
Data Penempatan Tenaga Kerja
Periode Tahun 2020-2024

No.	Jenis Data	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	AKAD					
	Laki-laki	1.375	1.018	1.939	1.934	129
	Perempuan	1.520	2.200	3.120	2.082	110
Jumlah		**2.895**	**3.218**	**5.059**	**4.016**	**239**
2.	AKL					
	Laki-laki	388	1.138	1.104	732	2272
	Perempuan	1.352	4.325	3.543	1.939	5962
Jumlah		**1.740**	**5.463**	**4.647**	**2.671**	**8234**
3.	AKAN					
	Laki-laki	25	80	611	118	254
	Perempuan	15	0	390	82	156
Jumlah		**40**	**80**	**1.001**	**200**	**410**

B. Bidang Hubungan Industrial Syarat Kerja

Dalam rangka meningkatkan kondisi hubungan industrial yang harmonis melalui peningkatan syarat kerja, perlu meningkatkan sarana prasarana hubungan industrial (Peraturan Perusahan, Perjanjian Kerja Bersama, Lembaga Kerjasama Bipartit, Tripartit, Dewan Pengupahan, meningkatkan perlindungan upah (UMK). Sedangkan untuk pelayanan hubungan industrial di Kabupaten Pemalang untuk kurun waktu tahun 2020-2024 dapat kami sajikan sebagaimana tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.8.
Data Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Industrial
Periode Tahun 2020-2024

No	Jenis Data	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah Perusahaan yang melakukan PHK	5	2	2	2	7
2.	Jumlah TK PHK	85	6	33	300	689
3.	Kasus perselisihan tenaga kerja	6	3	3	5	9
4.	Kasus kecelakaan tenaga kerja	-	-	-	-	-
5.	Kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan	-		61,52 %	55,02 %	64,58
6.	Jumlah perusahaan		420	433	454	457
7.	Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan 10 orang atau lebih yang telah memiliki peraturan perusahaan		73	79	83	
8.	Jumlah Perusahaan yang membuat Perjanjian Kerja Bersama	10	11	8	6	6
9.	Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan 50 orang atau lebih yang telah membentuk lembaga kerja sama bipartit	15	19	23	27	22
10.	Jumlah Perusahaan yang telah Memiliki Struktur dan Skala Upah	39	39	41	42	45
11	Upah Minimum Kabupaten (UMK)	1.865. 000	1.926. 000	1.940. 890	2.081. 783	2.156. 000

Perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam kurun waktu tahun 2020-2024 bersifat fluktuatif, tahun 2020 perusahaan yang melakukan PHK sebanyak 5 perusahaan disebabkan karena adanya wabah covid banyak banyak perusahaan melakukan PHK terhadap karyawannya, tahun 2020-2023 menurun hanya 2 perusahaan setelah adanya wabah covid perekonomian mulai tumbuh kembali dan perusahaan mulai beroperasi kembali . tahun 2024 mengalami kenaikan kembali karena ada beberapa perusahaan mengalami permasalahan internal.Sedangkan jumlah tenaga kerja yang terkena PHK pada tahun 2020 sebanyak 85 orang karena adanya wabah covid, tahun 2021 sebanyak 6 orang, tahun 2022 sebanyak 33 orang, tahun 2023 sebanyak 300 orang dikarenakan ada 2 perusahaan yang melakukan penutupan perusahan dan tahun 2024 sebanyak 689 orang dikarenakan ada satu perusahaan yang mengalami pailit. Untuk kasus perselisihan tenaga kerja pada tahun 2020 sebanyak 6 kasus, untuk tahun 2021 sebanyak 3 kasus, untuk tahun 2022 sebanyak 3 kasus, untuk tahun 2023 sebanyak 5 kasus dan tahun 2024 sebanyak 9 Kasus dikarenakan banyak perselisihan hak.

Sedangkan untuk Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Pemalang selama kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami kenaikan, untuk tahun 2020 sebesar Rp. 1.865.000,-, tahun 2021 sebesar Rp. 1.926.000,- tahun 2022 sebesar 1.940.890,41,- tahun 2023 sebesar Rp. 2.081.783, tahun 2024 sebesar Rp. 2.156.000,-.Tahun 2025 Rp. 2.296.140,-

https://jdih.pemalangkab.go.id

C. Bidang Perindustrian

Urusan Perindustrian memiliki fokus kinerja untuk meningkatkan dan mengembangkan industri dengan skala kecil dan menengah. Pada industri kecil menengah (IKM) mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 4,175% kemudian tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,3%, namun di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,5%. Hal tersebut disebabkan karena banyak industri kecil yang gulung tikar akibat kekurangan modal untuk produksi. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan kembali IKM tersebut adalah dengan memberikan fasilitasi akses permodalan, peningkatan kapasitas SDM IKM dan fasilitasi pemasaran produk IKM. Hasilnya pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 6,43%.

Perlu upaya lanjutan dari Bidang Perindustrian agar semua sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai di tahun-tahun berikutnya. Pengajuan ijin usaha industri dilayani secara online melalui OSS (Online Single Submission) dari Kementerian Investasi/BKPM, Fasilitasi SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) dan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), Rekomendasi Pengurangan Tarif Dasar Listrik Industri, Layanan Konsultasi Online dan Otomatis (LOTIS) untuk Industri Kecil dan Menengah.

Pada Tahun 2023 dilaksanakan pemantauan dan analisis ijin usaha industri kecil dan menengah terhadap 60 pengajuan permohonan dan dikeluarkan rekomendasi sebanyak 60 sehingga capaiannya sebesar 100%. Secara rinci perkembangan kinerja urusan perindustrian di Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut.

Tabel 2.9
Capaian Pembangunan Urusan Perindustrian Kabupaten Pemalang
Periode Tahun 2020-2024

NO	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase pertumbuhan IKM	%	0,25	4,2	5,5	5	6,43
2.	Konstribusi sektor industri terhadap PDRB	%	21,94	21,95	20,58	22,38	22,51
3.	Persentase Industri yang mendapat fasilitas Izin Usaha Industri	%	100	100	100	100	100
4.	Persentase kelengkapan data industri yang masuk dalam SIINAS	%	23,8	17,5	72	100	100
5.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	0	20	20	95,32	46,7
6.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha Industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	57,53	32,73	100	100

D. Bidang Transmigrasi

Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat

https://jdih.pemalangkab.go.id

sekitarnya serta peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah.

Tabel 2.11
Data Transmigrasi Periode Tahun 2020-2024

NO	Jenis Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah calon transmigran (KK)	0	0	0	0	1
2.	Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK)	0	0	0	0	3

Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya serta peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah. Dari tahun 2020-2023 untuk pemberangkatan transmigari dari Kabupaten Pemalang tidak ada karena pemberangkatan transmigrasi tergantung kuota dari pusat. Upaya Disnaker adalah dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penetapan kuota transmigrasi. Tahun 2024 Disnaker Kabupaten memberangkatkan 1 KK ke Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang perlu menjalin kerjasama dengan perusahaan dan stakeholders bidang ketenagakerjaan : Kementrian Tenaga Kerja, Disnakertrans Propinsi, Lembaga – Lembaga pelatihan kerja, BKK, IMCA, P3MI, APINDO, SPSI.

Sedangkan untuk capaian/realisasi indikator kinerja daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang tahun 2016-2021 dapat kami sajikan sebagaimana tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.11.
Capaian Pembangunan Urusan Tenaga Kerja 5 Tahun Terakhir Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun					Pertumbuhan Kinerja				Rata-Rata
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,64	6,71	6,63	6,55	6,63	-0,93	0,08	0.08	-0,08	-0,31
2	TPAK	%	65,57	65,9	69,91	69,58	72,24	0,33	4,01	-0,33	2,66	1,67
3	TPAK Laki-laki	%	81,25	80,14	84,56	86,5	85,15	-1,11	4,42	1,94	-1,35	0,98
4	TPAK Perempuan	%	50,48	52,14	55,78	52,33	59,09	1,66	3,64	-3,45	6,76	2,15
5	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah/ Orang	0	31,43	30,98	27,1	76,47	31,43	-0,45	-3,88	49,37	19,12
6	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	0	53,55	63,09	55,02	64,58	53,55	9,54	-8,07	9,56	16,15
7	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten Pemalang	%	0	66,96	87,26	62,76	71,74	66,96	20,3	-24,5	8,98	17,94
8	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	0	47,05	47,47	86,07	100	47,05	0,42	38,6	13,93	25,00
9	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%		63,02	3,55	4,27	5,49	63,02	-59,47	0,72	1,22	1,37
10	Prosentase calon tenaga kerja yang di latih	%	0	0	81,63	83,54	83,12	0	81,63	1,91	-0,42	20,78
11	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kab/Kota	%	0	66,96	87,26	62,76	71,74	66,96	20,3	-24,5	8,98	17,94
12	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	21,94	21,96	21,99	22,38	22,51	20,96	20,99	21,38	21,51	19,99

Sumber : DTKPT Kabupaten Pemalang, 2025

Pencapaian target kinerja tidak lepas dari faktor pendanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 2021-2026. Adapun pendanaan program kegiatan beserta realisasinya secara rinci tercantum pada tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.12.
Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)				Persentase Realisasi Anggaran (%)			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	2.330.000	-	47.392.400	-	170.000	170.000	2.319.270	-	47.305.600	-	99,54	-	99,82	-
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	870.400.000	901.282.500	1.514.730.000	3.942.020.000	1.499.010.510	1.499.010.510	846.778.935	884.848.512	1.511.516.100	3.882.878.646	97,29	98,18	99,79	98,50
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	893.491.000	1.105.975.000	858.000.000	1.010.100.000	1.000.131.930	1.000.131.930	884.502.263	1.103.499.009	856.849.300	985.002.920	98,99	99,78	99,87	97,52
4	Program Hubungan Industrial	280.000.000	200.000.000	175.000.000	546.518.000	2.961.595.700	2.961.595.700	273.578.199	199.211.016	168.977.870	532.346.993	97,71	99,61	96,56	97,41
5	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	15.000.000	116.039.000	8.000.000	176.600.000	12.378.300	12.378.300	12.193.917	104.855.924	7.917.000	123.934.721	81,29	90,36	98,96	70,18
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.501.068.000	6.386.472.000	6.400.541.150	5.809.836.350	5.743.198.990	5.743.198.990	5.339.880.742	6.285.625.584	6.145.690.925	5.093.228.487	97,07	98,42	96,02	87,67
7	Program Perencanaan Pembangunan Industri	756.213.700	1.004.978.150	1.088.451.949	1.314.396.163	1.314.396.163	1.445.835.780	687.467.000	913.616.500	989.501.772	1.194.905.603	92	98	100	96
8	Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten/Kota	84.896.471	54.890.000	74.212.662	123.209.560	123.209.560	135.530.516	77.178.610	49.900.000	67.466.056	112.008.691	88	99	100	86
9	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	97.341.200	40.700.000	72.839.903	122.647.234	122.647.234	134.911.957	88.492.000	37.000.000	66.218.094	111.497.485	95	91	98	89

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan melihat kondisi kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang sebagaimana uraian diatas, maka tantangan, peluang dan pengembangan pelayanan yang harus kita hadapi antara lain:

a. Tantangan

1. Masih tingginya jumlah pengangguran di Kabupaten Pemalang sehingga diperlukan upaya untuk menurunkan jumlah pengangguran dengan meningkatkan perluasan kesempatan kerja.
2. Tingginya jumlah pencari kerja dan tenaga kerja yang belum memperoleh pelatihan kerja;
3. Terbatasnya sarana prasarana pendukung BLK.
4. Masih rendahnya tingkat kepatuhan Perusahaan industry dalam melaporkan data industry melalui SIINas.
5. Masih tingginya ketergantungan pelaku industry kecil dan menengah terhadap fasilitasi pemerintah daerah dan pihak lainnya.
6. Masih rendahnya kesadaran pelaku industry kecil dan menengah terhadaap HAKI.
7. Regenerasi pelaku industri kecil dan menengah belum optimal.

b. Peluang

1. Semakin majunya teknologi informasi melalui internet sehingga menjadikan upaya masyarakat untuk memperoleh kesempatan kerja baik formal maupun informal semakin terbuka dengan atau tanpa memanfaatkan fasilitas BKO (Bursa Kerja Online) yang ada sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja;
2. Aplikasi Data Ketenagakerjaan semakin berkembang sehingga pencari kerja dan pemberi kerja bisa bertemu secara online tanpa melalui tatap muka / Sistem Informasi Data Terpadu Ketenagakerjaan
3. Tumbuhnya perusahaan-perusahaan baru membuka peluang bertambahnya jumlah tenaga kerrja;
4. Terjalinnya Kerjasama dengan stakeholdels dalam bidang ketenagakerjaan;
5. Dengan adanya peningkatana kapasitas bagi Calon Pekerja Migran Indonesia membuka peluang kesempatan bekerja ke luar negeri ;
6. Revitalisasi Balai Latihan Kerja sebagai tempat uji kompetensi (TUK) guna peningkatan kualitas dan pengakuan tenaga kerja.
7. Memaksimalkan instruktur dan tenaga kepelatihan/tenaga pelaksana untuk menyelesaikan administrasi pelatihan dan administrasi perkantoran;

https://jdih.pemalangkab.go.id

8. Memperluas pelayanan Antar Kerja 1 (AK1) secara online di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Pemalang sehingga dapat mempercepat pelayanan
9. Pertumbuhan industry kecil dan menengah memiliki trand positif
10. Banyaknya potensi hasil pertanian dan perikanan di kabupaten pemalang yang dapat diolah menjadi prodak unggulan oleh industry kecil dan menengah.

2.1.4. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang adalah :

1. Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam maupun luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja. Untuk pencari kerja biasanya untuk malamar pekerjaan dibutuhkan kartu Pencari kerja (AK1) selain itu untuk pelatihan yang ada di Balai Latihan kerja juga diperuntukan untuk pencari kerja;
2. Perusahaan
3. Salah satu tugas pokok dan fungsi adalah melakukan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Pemalang baik perusahaan besar, menengah dan kecil.
4. Tenaga Kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang mampu dan bersedia melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat;
5. Dinas Tenaga kerja, Perindustrian adalah dinas yang menangani urusan tenaga kerja, perindustrian dan transmigrasi.
6. Pelaku industry kecil dan menengah (IKM) dengan memberikan pelatihan, pendampingan, dan akses pembiayaan untuk meningkatkan daya saing usaha;
7. Industri Rumah Tangga, dengan membantu pengembangan produk lokal dan peningkatan kualitas produksi;
8. Masyarakat Umum, dengan melakukan edukasi terkait perlindungan konsumen dan peningkatan akses terhadap produk lokal.

2.1.5. Mitra Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang bermitra dengan pihak pihak yang dapat berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan dan peningkatan kinerja. Mitra tersebut adalah :

1. APINDO
2. SP/SB;
3. BPJS Ketenagakerjaan;
4. Manning Agent;
5. SPMI;
6. FORUM KOMUNIKASI BKK;

https://jdih.pemalangkab.go.id

7. BBPOM;
8. PT. Sucofindo;
9. Laboratorium Uji Tar danNikotin Kudus;
10. Asosiasi Petani Kopi Indonesia;
11. Asosiasi Petani Tembakau;
12. Perangkat Daera

2.1.6. Kerjasama Daerah

Kerjasama daerah dilakukan dalam rangka melegalkan suatu perjanjian yang saling menguntungkan serta menuangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan. Kerjasama yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang adalah :

Tabel 2.13.
Kerjasama Daerah

No	PERGURUAN TINGGI / INSTANSI	JANGKA WAKTU	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	•Pemerintah Kabupaten Pekalongan; •Pemerintah Kabupaten Purbalingga; •Pemerintah Kabupaten Tegal; •Pemerintah Kabupaten Banyumas.		Ketenagakerjaan	a. Memberdayakan Dan Mendayagunakan Tenaga Kerja Secara Optimal Dan Manusiawi. b. Mewujudkan Pemerataan Kesempatan Kerja Dan Penyediaan Tenaga Kerja Sesuai Dengan Kebutuhan Pembangunan Nasional Dan Daerah. c. Memberikan Perlindungan Kepada Tenaga Kerja Dalam Mewujudkan Kesejahteraan	a. Pelatihan Tenaga Kerja; b. Penempatan Tenaga Kerja; c. Pembinaan Hubungan Industrial.
	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia (STIEPARI) Semarang		Pelaksanaan Program *Three In One* (Kuliah, Pelatihan, Dan Bekerja) Bagi Masyarakat Kabupaten Pemalang	a.Mengikuti Pelatihan Kerja di LPK mitra STIEPARI Semarang; b.Bekerja di Perusahaan Mitra STIEPARI Semarang; dan c.Kuliah di STIEPARI Semarang.	a.Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat Kabupaten Pemalang; b.Perkuliahan di STIEPARI Semarang; c.Pelatihan Pada LPK Mitra STIEPARI Semarang; dan Penempatan Tenaga Kerja Pada Perusahaan Mitra

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	PERGURUAN TINGGI / INSTANSI	JANGKA WAKTU	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
					STIEPARI Semarang
	Pemerintah Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah		Transmigrasi	Mengintegrasikan dan mensinergikan pelaksanaan transmigrasi di Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah	a. penyiapan kesediaan masyarakat menerima penempatan transmigran; b. penyusunan rencana teknis; c. legalisasi status tanah; d. pelayanan pertanahan; e. monitoring pembangunan permukiman; f. pelatihan transmigran; g. fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran; h. bimbingan adaptasi lingkungan; i. fasilitasi pelayanan bantuan catu pangan; j. pengembangan masyarakat yang menyangkut: 1. tahap penyesuaian, 2. tahap pemantapan, dan 3. tahap kemandirian. k. kemitraan.
	1.PT. Ghony Jaya Abadi (Teknik Las) 2.PT. Anugrah Mega Jaya (Teknik Las)	19 Juni 2024 s/d 19 Juni 2026	MoU Balai Latihan Kerja Disnaker Kabupaten Pemalang dengan	Meningkatkan kualitas SDM yang terampil, kompeten, dan siap kerja sesuai	Hasil kerja sama yang disepakati dalam dokumen tersebut,

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	PERGURUAN TINGGI / INSTANSI	JANGKA WAKTU	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	3.PT. Tunggal Mitra Perkasa (Otomotif) 4.PT. Prima Anaga Raina (Otomotif) 5.Comal Abadi Motor (Otomotif) 6.Astra Motor Pemalang 1 (Otomotif) 7.Astra Motor Pemalang 2 (Otomotif) 8.AHASS Motor Pemalang (Otomotif		beberapa perusahaan diantaranya :	kebutuhan industri, melalui pelatihan, magang, serta penyerapan tenaga kerja. Perusahaan mendapatkan tenaga kerja potensial, sementara BLK dapat menyalurkan peserta dan mengembangkan program yang berkelanjutan dan tepat sasaran.	seperti program pelatihan, sertifikasi tenaga kerja, penyaluran kerja, dan program magang yang mendukung tujuan bersama, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja perusahaan. Secara keseluruhan, output dari Mou ini adalah hasil nyata dari kolaborasi tersebut, baik itu berupa peningkatan kapasitas SDM, pemenuhan kebutuhan rekrutmen, maupun dampak positif lainnya bagi perkembangan industri dan peningkatan kualitas tenaga kerja.
	9.PT. Mega Putra Garment (Menjahit) 10.PT Daiwabo Garment Indonesia (Menjahit) 11.PT. Dwi Bintang Global (Menjahit) 12.PT. Kali Comal Megah Mandiri (Menjahit) 13.PT. Multikarya Garmentexindo (Menjahit) 14.PT. Noor Amara Garmindo (Menjahit) PT. Ria Indah Terang Abadi (Menjahit)	17 Februari 2022 s/d 17 Februari 2024			

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang.

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan evaluasi dan analisis terhadap capaian hasil-hasil pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi masih banyak permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Kesenjangan keterampilan dan kebutuhan pasar kerja;
2. Kurangnya kapasitas SDM tenaga kerja;
3. Minat bekerja di Kabupaten Pemalang masih rendah;
4. Kurangnya kesejahteraan tenaga kerja;
5. Akses Informasi data ketenagakerjaan terbatas;
6. belum optimalnya pengembangan kawasan transmigrasi
7. Klaster dan sentra IKM belum saling terhubung antara pelaku usaha, pemasok, pasar, dan lembaga pendukung;
8. Banyak IKM belum memiliki teknologi, SDM, dan kapasitas produksi yang mampu bersaing di pasar;
9. Fasilitas seperti akses jalan, listrik, air, dan tempat produksi belum memadai di banyak sentra IKM;
10. Minimnya inkubator bisnis atau pusat inovasi IKM di daerah.

Tabel 2.14.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang

Urusan	Sub Urusan	Kewenangan	Indikator	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, serta transmigrasi	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar		Penyerapan tenaga kerja rendah	Kesenjangan keterampilan dan kebutuhan pasar kerja	Kurangnya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan kerja
						Kurikulum pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri
						Kurangnya koordinasi antara Lembaga pendidikan, perusahaan dan instansi terkait
					Kurangnya kapasitas SDM tenaga kerja	Kurangnya pelatihan teknis terkait produk baik kualitas maupun kuantitas (manajemen)
						Kurangnya pelatihan terkait manajemen keuangan, pemasaran, dan lain-lain
						Belum meratanya pencari kerja yang mengikuti pelatihan (Sarpras Pelatihan)
					Minat bekerja di Kabupaten	UMK yang masih tergolong rendah serta banyak perusahaan yang belum menerapkan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Urusan	Sub Urusan	Kewenangan	Indikator	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
					Pemalang masih rendah	struktur skala upah
						Pola pikir masyarakat yang masih menganggap kerja di Ibu kota jauh lebih baik
						Lemahnya mentalitas tenaga kerja sekarang serta rendahnya soft skill tenaga kerja
					Kurangnya kesejahteraan tenaga kerja	Masih rendahnya pemahaman perusahaan terhadap aturan dan perundagan ketenagakerjaan
						Minimnya peluang untuk meningkatkan jenjang karier (terutama di bidang industri)
						Kurangnya peningkatan kapasitas SDM tenaga kerja di perusahaan
					Akses Informasi terbatas	Belum adanya system informasi ketenagakerjaan (BKO/Bursa Kerja Online)
						Belum semua perusahaan menyampaikan informasi terkait lowongan kerja ke Disnaker
						Belum terintegrasinya data pencari kerja dengan sistem informasi pasar kerja
					Belum optimalnya pengembangan kawasan transmigrasi.	• Jumlah kuota transmigrasi ditentukan oleh pemerintah pusat • Penempatan tidak sesuai: Banyak transmigran ditempatkan di daerah yang belum siap infrastruktur atau kurang subur untuk pertanian. • banyak daerah tujuan transmigrasi masih miskin fasilitas, sehingga transmigran sulit berkembang; • Banyak transmigran

https://jdih.pemalangkab.go.id

Urusan	Sub Urusan	Kewenangan	Indikator	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
						tidak memiliki keterampilan bertani atau berdagang di lingkungan baru, dan akhirnya gagal mandiri setelah bantuan habis
	Perizinan	a.Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah. b.Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah. c.Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.	a.Jumlah IUI Kecil dan Menengah yang diterbitkan per tahun. b. Persentase pelaku industri kecil dan menengah (IKM) yang telah memiliki IUI. c. Jumlah pelatihan/sosialisasi terkait IUI yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.	Belum optimalnya pertumbuhan IKM, perkembangan klaster atau perkembangan sentra.	Belum Terbangunnya Ekosistem Industri yang Terintegrasi	• Klaster dan sentra belum saling terhubung antara pelaku usaha, pemasok, pasar, dan lembaga pendukung. • Banyak IKM belum memiliki teknologi, SDM, dan kapasitas produksi yang mampu bersaing di pasar. • Fasilitas seperti akses jalan, listrik, air, dan tempat produksi belum memadai di banyak sentra. • Minimnya inkubator bisnis atau pusat inovasi di daerah.

2.2.2. Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang.

Isu strategis pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang terkait dengan pelaksanaan fungsi Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang adalah Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi , maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis, baik yang berasal dari internal maupun eksternal

Berdasarkan gambaran kondisi dan hasil identifikasi permasalahan dan telaah visi misi Kabupaten Pemalang diatas, maka isu strategis yang kita hadapi pada 5 (lima) tahun yang akan datang adalah Penyerapan tenaga kerja rendah.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.15.
Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah	**Permasalahan Perangkat Daerah**	**ISU KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah**	**ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD**			**ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
			GLOBAL	**NASIONAL**	**REGIONAL**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	1. Kesenjangan keterampilan dan kebutuhan pasar kerja; 2. Kurangnya kapasitas SDM tenaga kerja; 3. Minat bekerja di Kabupaten Pemalang masih rendah; 4. Kurangnya kesejahteraan tenaga kerja; 5. Akses Informasi terbatas; 6. belum optimalnya pengembangan kawasan transmigrasi	Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah	1. Transformasi Digital & Otomatisasi - Pergeseran jenis pekerjaan akibat otomatisasi.	1. Penganggguran & Angkatan Kerja Muda Tingkat pengangguran tinggi, khususnya di kalangan lulusan muda dan SMK.	1. Isu Perdagangan Manusia & Buruh Migran	Penyerapan tenaga kerja rendah

https://jdih.pemalangkab.go.id

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	ISU KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
· Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. · Sertifikasi dan peningkatan skill sesuai kebutuhan industri lokal.			2. Pekerjaan Layak dan Upah Minimum -Banyak negara belum menyediakan pekerjaan layak sesuai standar ILO. -Isu ketimpangan upah antara negara maju dan berkembang. 3. Pekerja Migran & Eksploitasi	Mismatch antara lulusan pendidikan dan kebutuhan industri. 2. Upah Minimum & Kesejahteraan Buruh o Perbedaan tentang sistem pengupahan yang adil dan layak. o Isu pesangon, PHK massal, dan perlindungan sosial.	Masalah trafficking dan buruh paksa masih marak di sektor pertanian, perikanan, dan konstruksi.	
2.Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja			- Perlindungan hukum lemah bagi pekerja migran. - Eksploitasi, perdagangan manusia, dan kondisi kerja tidak manusiawi.	3. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) o Banyak kasus kekerasan, overwork, dan pemotongan gaji pada PMI. o Belum banyak pelatihan kompetensi bagi CPMI;		

https://jdih.pemalangkab.go.id

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	ISU KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
· Job matching antara pencari kerja dengan industri lokal. · Pembukaan lowongan kerja melalui bursa kerja daerah. · Mendorong padat karya produktif di sektor informal 3.Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja · Pengawasan terhadap perusahaan terkait pemenuhan hak pekerja (upah, jam kerja, keselamatan kerja, dll). · Menangani perselisihan hubungan industrial di wilayahnya. · Penyuluhan norma ketenagakerjaan ke perusahaan-perusahaan lokal. 4.Pengembangan Kewirausahaan dan UMKM · Mendorong wirausah				o Ketidakjelasan aturan / regulasi tentang PMI		

https://jdih.pemalangkab.go.id

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	ISU KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
a baru berbasis potensi daerah. · Fasilitasi modal kerja, pelatihan manajemen usaha, dan pemasaran produk lokal. 5.Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal · Mendorong perusahaan agar mengutamakan tenaga kerja lokal. · Kerjasama dengan industri untuk menyerap lulusan lokal. · Pendataan potensi dan kebutuhan tenaga kerja daerah. 6. Data dan Informasi Ketenagakerjaan · Pemetaan potensi ketenagakerjaan (jumlah pencari kerja, lulusan, tenaga kerja terampil). · Sistem informasi ketenagakerjaan daerah (job fair,						

https://jdih.pemalangkab.go.id

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	ISU KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
website lowongan kerja, dll).						
a. pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri;	Keterbatasan data terkait Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri	Belum optimalnya penyiapan dan pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri	Ekspansi perusahaan global ke kawasan asia tenggara	Ekspansi perusahaan besar ke kawasan Jawa Tengah	Adanya kawasan industri di daerah sekitar	Belum optimalnya penyediaan data dan pengembangan IKM serta sentra/klaster IKM
b. Pembinaan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah;	Rendahnya daya saing IKM	Belum optimalnya pembnaan dan pemberdayann IKM	Produk-produk IKM global semakin banyak di pasaran	1. Standarisasi produk dan kewajiban TKDN Industri hijau untuk mendukung ekonomi berkelanjutan	Persaingan produk IKM antar daerah yang semakin ketat	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029.

Dalam RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 ditetapkan Visi Kabupaten Pemalang adalah Pemalang BERCAHAYA (BERSIH, CAKAP, HANDAL DAN MULYA).

1. **BERSIH**

   Mengandung arti bahwa Pemalang menjadi Kabupaten yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan;

2. **CAKAP**

   Dimaknai Pemalang memiliki sumber daya manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan masyarakat pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya;

3. **HANDAL**

   Dimaknai kolaborasi pasangan pemimpin yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.

4. **MULYA**

   Artinya maju, unggul, lestari dan berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius.

Visi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030 dijabarkan dalam beberapa misi untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan yang mendukungnya. Misi dalam perencanaan pembangunan memiliki beberapa fungsi antara lain : mengarahkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai visi, mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan ke dalam satu kesatuan yang utuh, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Adapun misi yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. **RESIK**

   Artinya menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih. Masyarakat Kabupaten Pemalang mempunyai budaya hidup bersih, kesadaran untuk mewujudkan lingkungan yang bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga, termasuk pengelolaan sampah yang baik.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2. **HIJAU**
   Artinya meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan. Meningkatnya kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sektor unggulan, mewujudkan ekonomi hijau yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas yang ramah lingkungan, industri hijau yang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM yang mampu menjadi UMKM yang mampu mengolah sampah yang dihasilkan.
3. **APIK**
   Mewujudkan Kabupaten Pemalang yang dikelola dengan baik dan ramah, menciptakan penataan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan pemukiman kumuh yang dilaksanakan mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.
4. **PEDULI**
   Mewujudkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat, mewujudkan kualitas SDM dari sisi pendidikan dan kesehatan untuk menjadi SDM yang memiliki karakter dan berprestasi.
5. **SILATURAHMI**
   Mewujudkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera. Pemerintah Kabupaten Pemalang meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, saling menghormati dan tepa selira.
6. **ORGANISATORIS**
   Mewujudkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Dengan kata lain, Pemerintah Kabupaten Pemalang mewujudkan good governance, clean governance dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.
7. **DIGITALISASI**
   Memanfaatkan teknologi informasi dan perkembanganya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar. Pemerintah Kabupaten Pemalang mendoring terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan reformasi birokrasi.
8. **IKHLAS**
   Artinya menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat pemalang untuk semua kalangan. Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman dan aman dalam kehidupan spiritual, mengembangkan kearifan dan budaya lokal.

Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang yang memiliki Urusan Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi maka masuk dalam **VISI MULYA** Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas

https://jdih.pemalangkab.go.id

lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius dan **VISI CAKAP** dimaknai memiliki sumber daya manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.

Dan masuk **Misi Silaturahmi** : Meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong,tepa selira dan sejahtera

Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, dan saling menghormati dan teposliro dan masuk **Misi Hijau** : Meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industry hijau yang berkelanjutan, **Misi Apik** : Meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah, **Misi Digitalisasi** : Memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar.

12 PROGRAM PRIORITAS

1. Seragam sekolah dan LKS Gratis
2. Jalan halus merata
3. Revitalisasi penyediaan air bersih dari hulu sampai hilir
4. Penyediaan lapangan kerja melalui program padat karya
5. Bantuan modal usaha untuk UMKM
6. WIFI gratis tiap desa
7. Satu ambulance, satu desa
8. Jaminan ketersediaan bibit unggul dan pupuk murah
9. Bantuan kendaraan operasional pondok pesantren
10. Insentif untuk guru honorer, TPQ, Madin dan Marbot
11. Santuan kematian Rp 3.000.000,-
12. Pembukaan Pintu Tol Sewaka

Dari 12 program prioritas Bapak Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang adalah Program Santunan Kematian.

Tahun 2025 merupakan tahun awal kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029, sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Bupati – Wakil Bupati **"PEMALANG BERCAHAYA"** dan Misi **"RHAPSODI"** yang ada di RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, ditetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang.

Tujuan merupakan penjabaran Kewenangan Perangkat Daerah yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Pembangunan jangka menengah Daerah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.Tujuan

https://jdih.pemalangkab.go.id

merupakan suatu kondisi yang diharapkan dapat terwujud dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan atau pada saat masa Renstra PD ini berakhir. Sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi jangka pendek yang harus diwujudkan guna mencapai tujuan yang dirumuskan.

3.1.1. Tujuan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi, Kabupaten Pemalang

Tujuan daerah sesuai yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat.
2. Meningkatkan daya saing pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel (T2) dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi .

Sedangkan Tujuan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang sesuai misi Bupati Pemalang yaitu "**Silaturahmi, Hijau, dan Apik"** adalah Meningkatnya kualitas penanganan pengangguran dan Meningkatnya peran koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian dalam perekonomian daerah.

3.1.2. Sasaran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi kabupaten Pemalang.

Sedangkan sasaran Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang adalah :

1. meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabiltas perangkat daerah;
2. Meningkatnya kualitas kompetensi, penempatan dan hubungan industrial;
3. Meningkatnya jumlah Industri Kecil Menengah

Selanjutnya rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang akan tersaji pada tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Kondisi Akhir Renstra	Strategi	Kebijakan	Program
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
VISI : MULYA dan CAKAP			Indikator T1												
MISI:SILA TURAHMI Meningkatnya penanganan pengangguran dan Meningkatnya daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal	Meningkatnya kualitas penanganan penganggguran dan kontribusi industri dalam perekonomian daerah		Tigkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	72,24	72,6	72,96	73,32	73,68	74,05	74,41	74,41	a. Meningkatkan Pembinaan dan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) melalui Pembinaan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	a. Melakukan penyusunan rencana tenaga kerja daerah dan pembinaanya baik secara Makro dan Mikro	Program Perencanaan Tenaga Kerja

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Kondisi Akhir Renstra	Strategi	Kebijakan	Program
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		S1.1 Meningkatnya kualitas kompetensi, penempatan dan hubungan industrial	Indikator S1.1 Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	%	27,13	27,39	27,65	27,92	28,19	28,46	28,73	28,73	b. Peningkatan kapasitas calon tenaga kerja melalui pelatihan baik berbasis kompetensi, berbasis kewirausahaan maupun berbasis masyarakat;	b. Peningkatan kesempatan kerja dan kapasitas calon tenaga kerja;	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
													c. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan untuk mendukung perencanaan dalam penciptaan kesempatan kerja;	c. Optimalisasi pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan;	
													d. Meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja melalui pelatihan baik berbasis kompetensi maupun berbasis kwirausahaan	d. Peningkatan ketrampilan tenaga kerja baik berbasis kompetensi maupun berbasis kewirausahaan	
													e.Peningkatan kinerja lembaga pelatihan swasta, perusahaan kecil dan	e.Peningkatan pengetahuan pengelola Lembaga	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Kondisi Akhir Renstra	Strategi	Kebijakan	Program
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
													tenaga kerja melalui pembinaan lembaga pelatihan swasta, dan peningkatan pengetahuan;	Latihan kerja sesuai standar kurikulum Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang ditentukan;	
													f.Meningkatkan sarana dan prasarana BLK sesuai dengan kebutuhan	f. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana BLK sesuai kebutuhan	
													g.Pembinaan dan penilaian kinerja lembaga pelatihan kerja swasta	g. Percepatan Lembaga Latihan kerja swasta memiliki status akreditasi	
													h.Peningkatan SDM kapasitas Lembaga pelatihan kerja swasta dengan mendorong lembahga pelatihan kerja swasta memiliki perijinan dan akreditasi.	h.Peningkatan kemampuan instruktur Lembaga pelatihan kerja pemerintah dan swasta.	
													i.Meningkatkan penempatan tenaga	i.Peningkatan perluasan kesempatan	Program Penemp

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Kondisi Akhir Renstra	Strategi	Kebijakan	Program
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
													kerja di dalam dan luar negeri	kerja dan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri	atan Tenaga Kerja
													j.Meningkatkan penyebarluasan informasi kesempatan kerja di dalam dan luar negeri baik melalui Bursa Kerja On Line (BKO), Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Job Fair Expo;	j.Memperluas akses informasi pasar kerja	
													k.Meningkatkan perlindungan Pekerja Migarn Indonesia	k.Peningkatan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia	
													l.Peningkatan IMTA yang memiliki perpanjangan melalui pembinaan perusahaan yang memiliki tenaga kerja asing	l.Pembinaan perusahaan yang memiliki TKA diprioritaskan pada perusahaan dengan IMTA yang belum memiliki perpanjangan;	
													m.Meningkatkan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif	m.Menjaga dan Meningkatkan	Program Hubun

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Kondisi Akhir Renstra	Strategi	Kebijakan	Program
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
													untuk Menciptakan Hubungan Industrial Kondusif dan Harmonis, serta Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Peningkatan Koordinasi dalam Penetapan Upah Minimum, Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Bipartit dan Lembaga Kerjasama Tripartit, Mendorong Perusahaan dalam Kepesertaan Jaminan Sosial dan Fasilitas Sarana Kesejahteraan Bagi Tenaga Kerja Baik Diluar Maupun Didalam Hubungan Kerja	Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif untuk Menciptakan Hubungan Industrial Kondusif dan Harmonis, serta Penguatan dan Pengelolaan Data dan Informasi Hubungan Industrial dengan 46yste penetapan 46ystem pengupahan yang berkeadilan, pemberdayaan Lembaga Kerjasama Bipartit dan pengesyahan peraturan perusahaan, peningkatan kepersertaan jaminan sosial.	gan Industrial

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Kondisi Akhir Renstra	Strategi	Kebijakan	Program
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi lokal		Meningkatnya jumlah IKM	Persentase pertumbuhan IKM	%	6,43	6,48	6,5	6,6	6,7	6,8	6.9	6,9	Meningkatkan pembinaan dan daya saing IKM	a. Peningkatan produksi dan kualitas industri unggulan b. Peningkatan unit usaha IKM dan kemitraan antar industry c. Peningkatan standarisasai produk	Perencanaan pembangunan industri
													n.Meningkatkan kualitas SDM pengelola transmigrasi	n. kapasitas aparat penyelenggara transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
													o.Mengoptimalkan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar 47ystem pendukung urusan transmigrasi.	o.Optimalisasi kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor	
													p.Koordinasi antarsektor dalam pembangunan kawasan transmigrasi, baik	p.Peningkatan koordinasi antarsektor dalam pembangunan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Kondisi Akhir Renstra	Strategi	Kebijakan	Program
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
													antar pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, maupun antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait dengan kesiapan daerah penempatan	kawasan transmigrasi	
													q.Meningkatkan motivasi dan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya transmigrasi untuk kehidupan yang lebih baik	q.Peningkatan motivasi dan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya transmigrasi untuk kehidupan yang lebih baik;	
		Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85,64	85,7	85,85	85,95	86,1	86,15	86,2	86,2	r.Perbaikan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat	r.Peningkatan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat	Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Nilai SAKIP	%	70,61	70	70	70	70	70	70	70	s.Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas	s.Penyusunan dokumen perencanaan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Kondisi Akhir Renstra	Strategi	Kebijakan	Program
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
													dokumen perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	dan penganggaran yang sinergis dengan kebijakan pemerintah pusat, dan provinsi serta penyusunan berbagai laporan kinerja sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1. Strategi

Strategi adalah merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029.

Sedangkan arah kebijakan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Nilai, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang.

Strategi Pemerintah Kabupaten Pemalang yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 terkait dengan sasaran daerah Meningkatnya penanganan pengangguran adalah :

1. peningkatan kompetensi tenaga kerja dan mendorong kebijakan hubungan industrial yang baik
2. Menyusun kebijakan dalam meningkatkan upah tenaga kerja dan penggunaan tenaga kerja lokal.
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam penempatan kerja dan pencarian tenga kerja.
4. Melakukan kerja sama dengan provinsi dan kabupaten sekitar dalam mendorong penempatan tenaga kerja.
5. Mendorong sekolah vokasi tingkat menengah (SMK), serta perguruan tinggi di Kabupaten Pemalang.
6. Keterampilan yang dibangun dalam sekolah vokasi disesuaikan dengan kebutuhan industri di Kabupaten Pemalang dan sekitarnya.
7. Melakukan kolaborasi dengan SMK/vokasi dalam penyerapan dan penempatan tenaga kerja. Pemenuhan jaminan perlindungan sosial pada ketenagakerjaan.
8. peningkatan industri yang ramah lingkungan dalam mendorong ekonomi hijau
9. Peningkatan akuntabilitas Pembangunan mellaui peningkatan kualitas perencanaan, kinerja dan pelaporan;
10. Peningkatan maturitas sistem pengendalian intern melalui peningkatan komitmen pemerintah dalam menjalankan Pembangunan, penguatan kebijakan dan regulasi,

https://jdih.pemalangkab.go.id

peningkatan kapabilitas APIP, penigkatan kualitas dan profesionalisme pegawai, penguatan manajemen resiko, digitalisasi serta evaluasi berkelanjutan.

11. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP), mewujudkan pelayanan berbasis digital, mudah dan murah.

Sedangkan arah kebijakan yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 terkait dengan sasaran daerah Meningkatnya penanganan pengangguran Peningkatan kompetensi tenaga kerja yang memiliki daya saing sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Selaras dengan strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang tercantum pada dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 maka Strategi Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah

a. Peningkatan Pembinaan dan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) melalui Pembinaan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro ;
b. Peningkatan kapasitas calon tenaga kerja melalui pelatihan baik berbasis kompetensi, berbasis kewirausahaan maupun berbasis masyarakat;
c. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan untuk mendukung perencanaan dalam penciptaan kesempatan kerja;
d. Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja melalui pelatihan baik berbasis kompetensi maupun berbasis kwirausahaan;
e. Peningkatan kinerja lembaga pelatihan swasta, perusahaan kecil dan tenaga kerja melalui pembinaan lembaga pelatihan swasta, dan peningkatan pengetahuan;
f. Peningkatan sarana dan prasarana BLK sesuai dengan kebutuhan
g. Pembinaan dan penilaian kinerja lembaga pelatihan kerja swasta
h. Peningkatan SDM kapasitas Lembaga pelatihan kerja swasta dengan mendorong lembahga pelatihan kerja swasta memiliki perijinan dan akreditasi.
i. Peningkatan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri
j. Peningkatan penyebarluasan informasi kesempatan kerja di dalam dan luar negeri baik melalui Bursa Kerja On Line (BKO), Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Job Fair Expo;
k. Peningkatan perlindungan Pekerja Migran Indoneisa.
l. Peningkatan IMTA yang memiliki perpanjangan melalui pembinaan perusahaan yang memiliki tenaga kerja asing.

https://jdih.pemalangkab.go.id

m. Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif untuk Menciptakan Hubungan Industrial Kondusif dan Harmonis, serta Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Peningkatan Koordinasi dalam Penetapan Upah Minimum, Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Bipartit dan Lembaga Kerjasama Tripartit, Mendorong Perusahaan dalam Kepesertaan Jaminan Sosial dan Fasilitas Sarana Kesejahteraan Bagi Tenaga Kerja Baik Diluar Maupun Didalam Hubungan Kerja;
n. Mendorong inovasi produk dan ekspansi ke pasar Insternasional untuk meningkatkan daya saing;
o. Perijinan
   Pemantauan dan pengawasan terhadap Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait untuk memastikan penggunaanizin sesuai peruntukkan;
p. Pendataan
   Pengumpulan dan pengolahan data industri untuk menjamin tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini;
q. Pengembangan kluster
   Pengembangan kluster untuk memperkuat perekonomian lokal dan meningkatkan daya saing sektor industri secara keseluruhan.
r. Integrasi SIINAS
   Peningkatan kepatuhan perusahaan industri dalam menyampaikan pelaporan data industri melalui SIINAS
s. Peningkatan kapasitas sumber daya industri sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing industri secara keseluruhan;
t. Penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan Sentra Industri
u. Peningkatan pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
v. Peningkatan fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
w. Peningkatankualitas SDM pengelola transmigrasi;
x. Mengoptimalkan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar system pendukung urusan transmigrasi.
y. Koordinasi antarsektor dalam pembangunan kawasan transmigrasi, baik antar pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, maupun antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait dengan kesiapan daerah penempatan

https://jdih.pemalangkab.go.id

z. Meningkatkan motivasi dan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya transmigrasi untuk kehidupan yang lebih baik
aa. pembinaan perusahaan yang memiliki tenaga kerja asing
bb. Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif untuk Menciptakan Hubungan Industrial Kondusif dan Harmonis, serta Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Peningkatan Koordinasi dalam Penetapan Upah Minimum, Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Bipartit dan Lembaga Kerjasama Tripartit, Mendorong Perusahaan dalam Kepesertaan Jaminan Sosial dan Fasilitas Sarana Kesejahteraan Bagi Tenaga Kerja Baik Diluar Maupun Didalam Hubungan Kerja;
cc. Peningkatankualitas SDM pengelola transmigrasi;
dd. Mengoptimalkan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar system pendukung urusan transmigrasi.
ee. Koordinasi antarsektor dalam pembangunan kawasan transmigrasi, baik antar pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, maupun antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait dengan kesiapan daerah penempatan
ff. Meningkatkan motivasi dan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya transmigrasi untuk kehidupan yang lebih baik
gg. Perbaikan kualitas pelayanan prima kepada Masyarakat
hh. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dokumen perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan;

Dalam rangka mencapai strategi di atas maka pentahapan strategi setiap tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Penahapan Renstra Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang

TAHAP I (2026)	**TAHAP I (2027)**	**TAHAP III (2028)**	**TAHAP IV (2029)**	**TAHAP V (2030)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Penguatan pondasi ketenagakerjaan, perindustrian dan transmigrasi	Pengembangan kapasitas SDM Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Transmigrasi	Akselerasi dan inklusifitas pelayanan ketenagakerjaan, perindustrian dan transmigrasi	Konsolidasi dan evaluasi capaian kinerja ketenagakerjaan, perindustrian dan transmigrasi	Pemantapan dan keberlanjutan program ketenagakerjaan, perindustrian dna transmigrasi
• pemetaan tenaga kerja, • penyusunan data base dan sistem informasi tenaga kerja, • sosialisasi program pelatihan dan penempatan kerja,	Pengembangan SDM dan peningkatan akses kerja melalui - pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan	- Peningkatan skala dan cakupan pelatihan ke wilayah terjauh, - penerapan teknologi digital untuk layanan ketenagakerjaan (Job	Konsolidasi dan evaluasi capaian melalui - evaluasi menyeluruh capaian indikator kinerja ketenagakerjaan, - replikasi program unggulan di daerah lain, - optimalisasi pelibatan	- Pemantapan dan keberlanjutan program tenaga kerja yang berhasil, - penyusunan program tenaga kerja, - penerapan tenaga kerja di sektor

https://jdih.pemalangkab.go.id

• peningkatan kapasitas kelembagaan BLK dan penguatan lembaga tripartit (Pengusaha, Pemerintah dan Pekerja; • Konsolidasi data dan pemetaan industri. • Penataan kelembagaan Sentra IKM • Penyusunan roadmap pengembangan IKM berbasis potensi lokal. • Peningkatan kepatuhan industri terhadap SIINAS	kebutuhan pasar, - sertifikasi tenaga kerja, - penguatan kemitraan dengan sektor swasta untuk pemagangan, pengembangan wirausaha baru berbasis tenaga kerja lokal dan - peningkatan layanan informasi bursa kerja. - Pembinaan hubungan industrial - Peningkatan kompetensi SDM IKM - Peningkatan kualitas produk IKM melalui sertifikasi, standarisasi, dan branding	Matching Online), - pelatihan bisnis tenaga kerja muda, - pemberdayaan kelompok rentan (difabel, perempuan, buruh migran) dan - penguatan pembinaan perusahaan dan norma kerja. - Promosi dan pemasaran produk unggulan daerah secara lebih luas. - Fasilitasi keikutsertaan IKM dalam *business matching* - Penguatan jejaring kemitraan usaha dan rantai pasok. - Pengembangan sistem distribusi dan logistik terpadu.	sektor swasta dan lembaga pelatihan kerja dan - integrasi program lintas sektor (pendidikan, sosial, koperasi). - evaluasi menyeluruh capaian indikator kinerja per industrian, replikasi program unggulan di daerah lain, optimalisasi pelibatan sektor swasta dan integrasi program lintas sektor.	strategis dan hijau, - peningkatan kontribusi sektor ketenaga kerjaan pada Pertumbuhan Ekonomi daerah, penguatan reformasi kelembagaan dan peraturan daerah ketenagakerjaan; - Pemantapan ekosistem usaha yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan - Implementasi prinsip ekonomi hijau dalam pembangunan industri - Peningkatan kontribusi sektor perindustrian pada Pertumbuhan Ekonomi daerah,

1. **Tahap I Tahun 2026**

   Penguatan pondasi ketenagakerjaan, perindustrian dan transmigrasi

   Penguatan pondasi ketenagakerjaan melalui
   - pemetaan tenaga kerja,
   - penyusunan data base dan sistem informasi tenaga kerja,
   - sosialisasi program pelatihan dan penempatan kerja,
   - peningkatan kapasitas kelembagaan BLK dan penguatan lembaga tripartit (Pengusaha, Pemerintah dan Pekerja;
   - Konsolidasi data dan pemetaan industri.
   - Penataan kelembagaan Sentra IKM
   - Penyusunan roadmap pengembangan IKM berbasis potensi lokal.
   - Peningkatan kepatuhan industri terhadap SIINAS

2. **Tahap II Tahun 2027**

   Pengembangan kapasitas SDM Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Transmigrasi
   - melalui pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan kebutuhan pasar,
   - sertifikasi tenaga kerja,
   - penguatan kemitraan dengan sektor swasta untuk pemagangan,
   - pengembangan wirausaha baru berbasis tenaga kerja lokal dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

- peningkatan layanan informasi bursa kerja.
- Pembinaan hubungan industrial

- Peningkatan kompetensi SDM IKM
- Peningkatan kualitas produk IKM melalui sertifikasi, standarisasi, dan branding

3. Tahap III Tahun 2028

Akselerasi dan inklusifitas pelayanan ketenagakerjaan, perindustrian dan transmigrasi

- Peningkatan skala dan cakupan pelatihan ke wilayah terjauh
- penerapan teknologi digital untuk layanan ketenagakerjaan (Job Matching Online),
- pelatihan bisnis tenaga kerja muda,
- pemberdayaan kelompok rentan (difabel, perempuan, buruh migran) dan
- penguatan pembinaan perusahaan dan norma kerja.
- Promosi dan pemasaran produk unggulan daerah secara lebih luas.
- Fasilitasi keikutsertaan IKM dalam *business matching;*
- Penguatan jejaring kemitraan usaha dan rantai pasok.
- Pengembangan sistem distribusi dan logistik terpadu.

4. Tahap IV Tahun 2029

Konsolidasi dan evaluasi capaian kinerja ketenagakerjaan, perindustrian dan transmigrasi

Konsolidasi dan evaluasi capaian melalui

- evaluasi menyeluruh capaian indikator kinerja ketenagakerjaan,
- replikasi program unggulan di daerah lain,
- optimalisasi pelibatan sektor swasta dan lembaga pelatihan kerja dan
- integrasi program lintas sektor (pendidikan, sosial, koperasi);
- evaluasi menyeluruh capaian indikator kinerja perindustrian,
- replikasi program unggulan di daerah lain,
- optimalisasi pelibatan sektor swasta dan integrasi program lintas sektor.

5. Tahap V Tahun 2023

Pemantapan dan keberlanjutan program ketenagakerjaan, perindustrian dan transmigrasi

- Pemantapan dan keberlanjutan program tenaga kerja yang berhasil;
- penyusunan program tenaga kerja;
- penerapan tenaga kerja di sektor strategis dan hijau:
- peningkatan kontribusi sektor ketenaga kerjaan pada Pertumbuhan Ekonomi daerah:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NPSK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
	Misi Silaturahmi : meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong,tepa selira dan sejahtera	Peningkatan kompetensi tenaga kerja yang memiliki daya saing sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri; Pengembangan industri kecil menengah dengan penguatan sentra/ kluster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital;	**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Kerja** - Yang meliputi peningkatan kompetensi melalui pendidikan, dan pelatihan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang. - Revitalisasi dan peningkatan peran BLK (Balai Latihan Kerja). **Pemerataan Kesempatan Kerja** Yaitu menciptakan kesempatan kerja yang merata di berbagai wilayah dan sektor, melalui Peningkatan Kualitas Kinerja Lembaga Penempatan Tenaga Kerja, Optimalisasi Fungsi Pengantar Kerja, Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja , Pelayanan Anatar Kerja Perlindungan Tenaga Kerja dalam dan Luar Negeri	
			Perlindungan Tenaga Kerja • Penguatan jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). • Peningkatan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).	
			Peningkatan Kesejahteraan Pekerja melalui peningkatan upah, jam kerja, keselamatan kerja maupun peningkatan kualitas hidup pekerja.	
			Pengembangan Hubungan Industrial yang Harmonis dan Berkeadilan Arah kebijakan ini menekankan pentingnya komunikasi dan dialog yang baik antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan produktif.	

https://jdih.pemalangkab.go.id

			Pemanfaatan Teknogi dan data Terintegrasinya system informasi pasar kerja **Peningkatan penempatan dan Kesejahteraan Transmigrasi** Meningkatkan Koordinasi dan Integrasi Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Tujuan Transmigrasi (Kurang Perindustrian)	
			Peningkatan produksi dan kualitas industri unggulan Ditempuh dengan cara pemetaan potensi unggulan daerah yang dapat dijadikan produk industri melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, fasilitasi dan pemberian subsidi mesin industri bagi IKM	
			Peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan antar industri Untuk mencapai hal ini ditempuh dengan cara fasilitasi dan pendampingan dalam proses perizinan dan legalitas usaha, fasilitasi kerjasama antara industri, business matching	
			Peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan antar industri Untuk mencapai hal ini ditempuh dengan cara fasilitasi dan pendampingan dalam proses perizinan dan legalitas usaha, fasilitasi kerjasama antara industri, business matching	

Selain itu terkait dengan kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Pemalang berpotensi menjadi migran center di Jawa Tengah. Ini berarti Pemalang akan menjadi pusat layanan dan informasi bagi pekerja migran, mulai dari persiapan sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga kepulangan mereka ke tanah air. Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, telah mengarahkan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi untuk mempersiapkan diri menjadi migran center.

Migran Center adalah pusat layanan terpadu yang menyediakan informasi, pelatihan, dan pendampingan bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan PMI yang akan, sedang, atau telah bekerja di luar negeri. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan, meningkatkan kompetensi, dan mencegah praktik penipuan terkait migrasi.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Upaya Yang Dilakukan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Dalam Rangka Optimalisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

1. Melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Ketiga (PKSDPK) dengan Serikat Buruh Migran Indonesia di Jakarta melalui Pembentukan MRC (Migrant Worker Resources Center) yang telah dilaunching oleh Bapak Bupati Pemalang pada tanggal 1 Mei 2024 dalam rangka untuk Optimalisasi Tata Kelola Pelindungan bagi PMI dan Keluarga PMI di Kabupaten Pemalang.
2. Pengajuan Proposal Pembangunan Gedung Vokasi Pelatihan bagi Pekerja Migran Indonesia ke Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
3. Merintis Kerja Sama dengan Badan Pelindungan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) di Semarang terkait Optimalisasi Pelayanan Terhadap PMI dan Keluarga PMI di Kabupaten Pemalang.
4. Optimalisasi Pelayanan ID Rekom bagi CPMI asal Kabupaten Pemalang yang akan ditempatkan bekerja di Luar Negeri.
5. Pembinaan dan Sosialisasi secara intensif kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan Manning Agency yang berada di wilayah Kab. Pemalang.
6. Melakukan Sosialisasi ke masyarakat di desa-desa wilayah Kabupaten Pemalang Terkait Mekanisme dan Persyaratan untuk menjadi PMI yang legal dengan menggandeng MRC, Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan baik secara langsung maupun melalui media sosial yang ada di Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang.
7. Penyusunan Data Base Ketenagakerjaan khususnya pada Tata Kelola Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang baik.
8. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Kegiatan dan Operasional pada P3MI dan Manning Agency yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang.
9. Melakukan pendampingan bagi Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Pemalang yang kembali ke Kabupaten Pemalang karena telah selesai menjalani masa kerja, sakit, yang meninggal dunia maupun yang mendapatkan masalah di Luar Negeri dan membantu dalam proses pemulangannya serta membantu proses pemberian santunan/asuransi.
10. Berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang untuk membentuk unit layanan khusus bagi PMI di Kabupaten Pemalang dalam hal Medical Check

https://jdih.pemalangkab.go.id

Up (MCU) sehingga dapat memberikan pendapatan bagi daerah (PAD).

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan SubKegiatan

Sesuai dengan Permendagri Nomot 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dann sasaran, serta strategi pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langka rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029), meliputi program, kegiatan,sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program yang dilaksanakan meliputi urusan wajib ketenagakerjaan dan urusan pilihan transmigrasi. Program ini merupakan penjabaran kebijakan strategis Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang yang akan dilaksanakan mencakup proegram pokok :

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja;
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja;
3. Program Penempatan Tenaga Kerja;
4. Program Hubungan Industrial;
5. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
7. Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
8. Program Pengelolaan Sistem Iinformasi Industri Nasional.

Untuk mendukung program pokok tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar, akan dilaksanakan program-program penunjang yang meliputi :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adalah aktivitas yang merupakan penjabaran dari program yang dibuat oleh suatu instansi pemerintah. Kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan yang disusun secara tahunan ini menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program yang berdimensi waktu 5 (lima) tahun. Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut adalah :

1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
   a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
   b. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
2. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
   a. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
   b. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
   c. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
3. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
   a. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
4. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
   a. Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi

https://jdih.pemalangkab.go.id

5. Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
   a. Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
6. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   a. Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
7. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
   a. Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
   b. Pelayanan antar Kerja
   c. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
   d. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
   e. Perluasan Kesempatan Kerja
8. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
   a. Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi
   b. Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
9. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
   a. Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online;
   b. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
   c. Job Fair/Bursa Kerja
10. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota;
    a. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
    b. Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran.
    c. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
11. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
    a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
12. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
    a. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
    b. Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan
    c. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
13. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
    a. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
    b. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
    c. Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
    d. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

https://jdih.pemalangkab.go.id

e. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

14. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
    a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri;
    b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri;
    c. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;
    d. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat;
    e. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri;
    f. Rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industry;
15. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
    a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
    b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota;
    c. Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui sistem informasi industri nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
16. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota;
    a. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
17. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
    a. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
    b. Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
    c. Penyuluhan Transmigrasi
    d. Pelatihan Transmigrasi
18. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

https://jdih.pemalangkab.go.id

d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

19. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
20. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
    b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
21. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
22. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    a. Pengadaan Mebel
    b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    c. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
    d. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
    e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
    f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
23. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
24. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    b. Pemeliharaan Mebel
    c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
    e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, ditetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang dengan disertai kebutuhan pendanaannya indikatif tersaji pada tabel 4.1. sebagai berikut (Terlampir) :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.1

Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM.KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
VISI MULYA MISI SILATURAHMI Meningkatnya penanganan penganggura n dan Meningkatnya daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal	Meningkatnya kualitas penangananan pengangguran dan kontribusi industri dalam perekonomian daerah	Meningkatnya kualitas kompetensi, penempatan dan hubungan industrial dan Meningkatnya jumlah Industri Kecil Menengah	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		Tujuan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Sasaran Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	
			Persentase Tersusunnya Dokumen Rencana Tenaga Kerja mikro dan makro			**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	
				Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro**	
				Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro**	
			Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	
			Prosentase pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi			**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	
				Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan		**Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

				Berbasis Kompetensi pada Tahun n		**Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi**	
				Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n		**Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja**	
				Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja		**Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota**	
				Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n		**Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi**	
				Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas		Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	
				Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	
			Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang terakreditasi			**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	
				Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	

https://jdih.pemalangkab.go.id

			Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja yang berizin			**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	
				Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi		Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	
			Persentase Perusahaan kecil/UMKM yang mendapatkan pembinaan produktivitasnya			**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	
				Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	
			Prosentase perusahaan yang diberikan pembinaan pengukuran produktifitas			**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	
			Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	
				Jumlah pencari kerja yang ditempatkan		**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	
						Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	

https://jdih.pemalangkab.go.id

				Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL		Pelayanan antar Kerja	
				Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	
				Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	
				Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja		Perluasan Kesempatan Kerja	
			Prosentase Lembaga penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang terfasilitasi dengan baik			**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	
				Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi		Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	
				Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku		Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	
			Jumlah pencari kerja yang mengakses informasi bursa kerja			**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	
				Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	
				Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	

https://jdih.pemalangkab.go.id

				Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)			
				Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja		Job Fair/Bursa Kerja	
			Prosentase Pekerja Migran Indonesia yang dilindungi			**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	
				Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	
				Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani		Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	
				Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	
			Prosentase perusahaan yang mematuhi peraturan penggunaan Tenaga Kerja Asing			**Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	
				Jumlah perusahaan yang dimonitoring penggunaan Tenaga Kerja Asing		Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

			terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)				
			Prosentase perusahaan yang mematuhi peraturan ketenagakerjaan			**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	
				Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	
				Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama		Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	
				Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
			Prosentase perselisihan hubungan industrial perusahaan yang ditangani dan terbinanya perusahaan yang mengikuti jaminan sosial			**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	
				Jumlah Perselisihan yang Dicegah		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang	

https://jdih.pemalangkab.go.id

						Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	
				Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
		Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah (IKM)	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian		% izin usaha industri yang diterbitkan	Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Data perizinan industri yang diterbitkan oleh Kabupaten/Kota diintegrasikan dengan SIINas	Jumlah usulan ijin usaha yang diterbitkan / mendapat rekomendasi	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

						Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri		% Ketersediaan informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
				Tersediannya data industri yang valid dan terkini (up to date)	Jumlah unit industri terdata dalam sistem	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Persentase transmigran yang ditempatkan			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	
			Jumlah transmigran yang ditempatkan			**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota**	
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota	
				Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan		Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota	
				Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan		Penyuluhan Transmigrasi	
				Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan		Pelatihan Transmigrasi	
		Meningkatnya kinerja	Nilai SAKIP		Prosentase dokumen perencanaan, keuangan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

		Pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah			dan evaluasi sesuai regulasi	**PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
			Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

https://jdih.pemalangkab.go.id

				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah berita acara hasil forum Perangkat Daerah berdasarkan bidanag yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Pelaksanaan forum Perangkat Daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan peranagkat daerah	
			Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
			Indeks Kepuasan Masyarakat		Prosentase layanan dan kepegawaian yang terpenuhi		
			Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		Fasilitasi kunjungan tamu	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

https://jdih.pemalangkab.go.id

			Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
				Jumlah unit kendaraan operasional atau lapangan yang disediakan		**Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan**	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Pengadaan Mebel	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kanator		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

			Pemerintahan Daerah yang Dipelihara			**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara		Pemeliharaan Mebel	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.2

Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan pendanaan

Dinas Tenaga Kerja. Perindustrian dan Transmigrasi kabupaten Pemalang

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Baseline 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket
				2026		2027		2028		2029		2030				
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
TENAGA KERJA																
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	**Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu kerencana tenaga kerja**	**-**	80	100	200.000	100	170.000	100	170.000	100	170.000	100	170.000	100	170.000	
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	**Persentase Tersusunnya Dokumen Rencana Tenaga Kerja mikro dan makro**	-	100	100	200.000	100	170.000	100	170.000	100	170.000	100	170.000	100	170.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	100.000	
Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	-	1 orang	2 Orang	100.000	2 Orang	70.000	2 Orang	70.000	2 Orang	70.000	2 Orang	70.000	2 Orang	70.000	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	**4,43**	**5,50**	2.03	790.100.000	2,78	1.499.010.510	3,45	1.499.010.510	4,05	1.499.010.510	4,6	1.499.010.510	4,6	1.499.010.510	
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Prosentase pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	**78,66**	**78,66**		747.000.000		1.478.319.160		1.478.319.160		1.478.319.160		1.478.319.160		1.478.319.160	
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	576 Orang	420 orang	420 Orang	746.000.000	420 Orang	1.391.319.160	420 Orang	1.391.319.160	420 Orang	1.391.319.160	420 Orang	1.391.319.160	420 Orang	1.391.319.160	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan /Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	-		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	388 orang	17 unit	20 Unit	1.000.000	17 Unit	87.000.000	17 Unit	87.000.000	17 Unit	87.000.000	17 Unit	87.000.000	17 Unit	87.000.000	
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas	-		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah kesepakatan /koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang terakreditasi	**100 %**	100	100	**20.000.000**	100	17.466.730	100	17.466.730	100	17.466.730	100	17.466.730	100	17.466.730	
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	41 lembaga	20 lembaga	20 Lembaga	20.000.000	20 Lembaga	17.466.730	20 Lembaga	17.466.730	20 Lembaga	17.466.730	20 Lembaga	17.466.730	20 Lembaga	17.466.730	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja yang berizin	**100 %**	100%	100 %	**3.000.000**	100%	**3.024.000**	100%	**3.024.000**	100%	**3.024.000**	100%	**3.024.000**	100 %	**3.024.000**	
Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	6 perizinan	6 perizinan	6 Perizinan	3.000.000	6 Perizinan	3.024.000	6 Perizinan	3.024.000	6 Perizinan	3.024.000	6 Perizinan	3.024.000	6 Perizinan	3.024.000	
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	**Persentase Perusahaan kecil/UMKM yang mendapatkan pembinaan produktivitasnya**	**-**	100%	100 %	**100.000.000**	100%	**100.000**	100%	**100.000**	100%	**100.000**	100%	**100.000**	100 %	**100.000**	
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	-	1 perusahaan	1 Perusahaan	100.000	1 Perusahaan	100.000	1 Perusahaan	100.000	1 Perusahaan	100.000	1 Perusahaan	100.000	1 Perusahaan	100.000	
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase perusahaan yang diberikan pembinaan pengukuran produktifitas	**-**	100%	100 %	**20.000.000**	100%	**100.000**	100%	**100.000**	100%	**100.000**	100%	**100.000**	100 %	**100.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	-	1 dokumen	1 Dokumen	**20.000.000**	1 Dokumen	**100.000**	1 Dokumen	**100.000**	1 Dokumen	**100.000**	1 Dokumen	**100.000**	1 Dokumen	**100.000**	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota**	**59%**	72	73,13	796.100.000	73,83	**2.000..131.930**	74,54	**2.000..131.930**	75,26	**2.000..131.930**	75,98	**2.000..131.930**	75,98	**2.000..131.930**	
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	**8.000 orang**		8.000	**781.100.000**	8.000	**1.421.803.930**	8.000	**1.421.803.930**	8.000	**1.421.803.930**	8.000	**1.421.803.930**	8.000	**1.421.803.930**	
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

	Peningkatan Kompetensi															
Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	7.500 orang	7.500 orang	8500 Orang	40.000.000	7500 Orang	57.636.600	7500 Orang	57.636.600	7500 Orang	57.636.600	7500 Orang	57.636.600	7500 Orang	57.636.600	
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	-	300 orang	400 Orang	40.000.000	300 Orang	65.376.300	400 Orang	65.376.300	400 Orang	65.376.300	400 Orang	65.376.300	400 Orang	65.376.300	
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	-	16 orang	15 Orang	100.000	16 Orang	40.759.520	15 Orang	40.759.520	15 Orang	40.759.520	15 Orang	40.759.520	15 Orang	40.759.520	
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan	180 orang	263 orang	180 Orang	701.000.000	280rang	1.258.031.510	280rang	1.258.031.510	280rang	1.258.031.510	280rang	1.258.031.510	280rang	1.258.031.510	

https://jdih.pemalangkab.go.id

	Kesempatan Kerja															
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Lembaga penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang terfasilitasi dengan baik			-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	-		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	-		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang mengakses informasi bursa kerja	**100 pencaker**		600	**10.000.000**	600	**378.328.000**	600	**378.328.000**	600	**378.328.000**	600	**378.328.000**	600	**378.328.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	-		-	-	-	50.000.000 -	-	50.000.000 -	-	50.000.000 -	-	50.000.000 -	-	50.000.000 -	
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	-		-	-	-	20.000.000 -	-	20.000.000 -	-	20.000.000 -	-	20.000.000 -	-	20.000.000 -	
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 orang	500 orang	400 Orang	**10.000.000**	600 Orang	**308.328.000**	600 Orang	**308.328.000**	600 Orang	**308.328.000**	600 Orang	**308.328.000**	600 Orang	**308.328.000**	
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pekerja Migran Indonesia yang dilindungi	**100 %**	100%	100 %	**5.000.000**	100%	**200.000.000**	100%	**200.000.000**	100%	**200.000.000**	100%	**200.000.000**	100 %	**200.000.000**	
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan	50 orang	20 orang	20 Orang	**5.000.000**	20 Orang	**130.000.000**	20 Orang	**130.000.000**	20 Orang	**130.000.000**	20 Orang	**130.000.000**	20 Orang	**130.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Migran Indonesia (PMI)	Kompetensinya															
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	-		-	-	20 Orang -	35.000.000 -	20 Orang -	35.000.000 -	20 Orang -	35.000.000 -	20 Orang -	35.000.000 -	20 Orang -	35.000.000 -	
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	-		-	-	20 Orang -	35.000.000 -	20 Orang -	35.000.000 -	20 Orang -	35.000.000 -	20 Orang -	35.000.000 -	20 Orang -	35.000.000 -	
Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase perusahaan yang mematuhi peraturan penggunaan Tenaga Kerja Asing	-		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dimonitoring penggunaan Tenaga Kerja Asing	-		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).**	**22,79**	100%	100 %	**2.675.200.000**	100%	**2.961.595.700**	100%	**2.961.595.700**	100%	**2.961.595.700**	100%	**2.961.595.700**	100 %	**2.961.595.700**	
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase perusahaan yang mematuhi peraturan ketenagakerjaan	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**46.000.000**	**100%**	**64.856.380**	**100%**	64.856.380	**100%**	64.856.380	**100%**	64.856.380	**100 %**	64.856.380	
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan	10 perush	10 perusahaan	10 Perusahaan	46.000.000	10 Perusahaan	64.856.380	10 Perusahaan	64.856.380	10 Perusahaan	64.856.380	10 Perusahaan	64.856.380	10 Perusahaan	64.856.380	

https://jdih.pemalangkab.go.id

	Industrial dan Terdaftar di WLKP Online															
Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	-		-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0 -	
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	-		-	-	0	0	0-	0	0	0	0	0	0	0	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase perselisihan hubungan industrial perusahaan yang ditangani dan terbinanya perusahaan yang mengikuti jaminan sosial	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**2.579.200.000**	**100%**	**2.896.739.320**	**100%**	**2.896.739.320**	**100%**	**2.896.739.320**	**100%**	**2.896.739.320**	**100 %**	**2.896.739.320**	
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	5 perkara	10 perkara	10 Perkara	25.000.000	10 Perkara	25.324.260	10 Perkara	25.324.260	10 Perkara	25.324.260	10 Perkara	25.324.260	10 Perkara	25.324.260	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	15 asosiasi dan serikat pekerja	20 Asosiasi dan Serikat Pekerja	20 Asosiasi dan Serikat Pekerja	10.000.000	20 Asosiasi dan Serikat Pekerja	7.541.540	20 Asosiasi dan Serikat Pekerja	7.541.540	20 Asosiasi dan Serikat Pekerja	7.541.540	20 Asosiasi dan Serikat Pekerja	7.541.540	20 Asosiasi dan Serikat Pekerja	7.541.540	
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	4 lembaga	5 lembaga	5 Lembaga	75.000.000	5 Lembaga	143.429.780	5 Lembaga	143.429.780	5 Lembaga	143.429.780	5 Lembaga	143.429.780	5 Lembaga	143.429.780	
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	50.375 orang	18.434 orang	12.000 Orang	2.469.200.000	12.000 Orang	2.720.443.740	12.000 Orang	2.720.443.740	12.000 Orang	2.720.443.740	12.000 Orang	2.720.443.740	12.000 Orang	2.720.443.740	
Program Perencanaan Pembangunan Industri	% peningkatan Dokumen Rencana Pembangunan Industri	100 %	100%	100 %	522.000.000	100%	892.390.320	100%	892.390.320	100%	892.390.320	100%	892.390.320	100 %	892.390.320	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembanagan, penyebaran dan perwilayahan industri	18 dokmn	10 dokmn	10 dokmn	522.000.000	100%	892.390.320	100%	892.390.320	100%	892.390.320	100%	892.390.320	100 %	892.390.320	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembanagan, penyebaran dan perwilayahan industri	8 dokmn	8 dokumn	8 dokumn	42.000.000	100%	58.685.000	100%	58.685.000	100%	58.685.000	100%	58.685.000	100 %	58.685.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pelaksanaan pembanagun	1 dokmn	1 dokumn	1 dokumn	30.000.000	100%	236.570.320	100%	236.570.320	100%	236.570.320	100%	236.570.320	100 %	236.570.320	

https://jdih.pemalangkab.go.id

	an sumber daya industri															
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	JUmlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industry dan peran serta masyarakat	9 dokmn	9 dokmn	9 dokmn	450.000.000	100%	597.135.00	100%	597.135.00	100%	597.135.00	100%	597.135.00	100 %	597.135.00	
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri					0											

https://jdih.pemalangkab.go.id

Rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri					0											
Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten/Kota	% usulan ijin usaha yang mendapat rekomendasi	100 %	100%	100 %	55.000.000	100%	37.673.000	100%	37.673.000	100%	37.673.000	100%	37.673.000	100 %	37.673.000	
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sector industry dan atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah tinggi dan	2 Dkmn	2 Dkmn	2 Dkmn	55.000.000	2 Dkmn	37.673.000	2 Dkmn	37.673.0000 55.000.000	2 Dkmn	37.673.000	2 Dkmn	37.673.000	2 Dkmn	37.673.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

	tinggi melalui SIINAS yang terintegrasi dengan system OSS															
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan terhadap terhadap perizinan berusaha industry kecil dan	1 dokmn	1 dokmn	1 dokmn	25.000.000	1 dokmn	15.000.000	1 dokmn	15.000.000	1 dokmn	15.000.000	1 dokmn	15.000.000	1 dokmn	15.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

	industry menengah yang berlokasi di satu Kab/Kota sepanajanag merupakan penanaman modal dalam negeri dan selain bidang tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat															
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui sistem informasi industri nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen laporan verifikasi pemenuhan persyaratan/ standard kegiatan usaha sector perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko untuk bidang usaha sector perindustrian dengan tingkat resiko usaha	1 dokmn	1 dokmn	1 dokmn	30.000.000	1 dokmn	22.673.000	1 dokmn	22.673.000	1 dokmn	22.673.000	1 dokmn	22.673.000	1 dokmn	22.673.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

	menengah-tinggi dan tinggi melalui SIINAS yang berintegrasi dengan system OSSRBA bagi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan skala usaha industry kecil dan industry menengah selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat															
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	% Ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	100	100	100	79.800.000	100	54.548.000	100	54.548.000	100	54.548.000	100	54.548.000	100	54.548.000	
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	Jumlah unit industri terdata dalam sistem	3 dok mn	3 dokmn	3 dok mn	79.800.000	100	54.548.000	100	54.548.000	100	54.548.000	100	54.548.000	100	54.548.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kewenangan Kabupaten/Kota																
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan pengolahan dan analisis industry, data kawasan industry serta data lain lingkup Kabupaten/ Kota system informasi Industri Nasional (SIINas)	100	100	100	79.800.00	100	54.548.000	100	54.548.000	100	54.548.000	100	54.548.000	100	54.548.000	
Deseminasi publikasi data informasi dan analisa industri kab./kota melalui SINas					0											

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS					0											
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**Persentase transmigran yang ditempatkan**	**30%**	8,57 %	11,43	**20.000.000**	14,3	**12.378.000**	20	**12.378.000**	22,87	**12.378.000**	28,57	**12.378.000**	28,57	**12.378.000**	
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah transmigran yang ditempatkan	**1 KK**	10 KK	10 KK	**20.000.000**	10 KK	**12.378.000**	10 KK	**12.378.000**	10 KK	**12.378.000**	10 KK	**12.378.000**	10 KK	**12.378.000**	
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2 laporan	2 laporan	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	5.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	1 KK	10 KK	3 Kepala Keluarga	10.000.000	3 Kepala Keluarga	5.000.000	3 Kepala Keluarga	5.000.000	3 Kepala Keluarga	5.000.000	3 Kepala Keluarga	5.000.000	3 Kepala Keluarga	5.000.000	
Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	-		-	-	-	1.000.000 -	-	1.000.000 -	-	1.000.000 -	-	1.000.000 -	-	1.000.000 -	
Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	-		-	-	-	1.378.000 -	-	1.378.000 -	-	1.378.000 -	-	1.378.000 -	-	1.378.000 -	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Prosentase Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah -	**100 %**		**100 %**	**5.762.883.000**	**100%**	**6.549.178.740**	**100%**	**6.549.178.740**	**100%**	**6.549.178.740**	**100%**	**6.549.178.740**	**100 %**	**6.549.178.740**	
	Prosentase layanan Umum dan Kepegawaian yang terpenuhi			**100 %**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100 %**		

https://jdih.pemalangkab.go.id

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Tersedianya dokumen perencanaan, penganggara, pengendalian, laporan Kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD**	**100 %**	100%	100 %	**32.486.300.000**	**100%**	**108.000.000**	**100%**	**108.000.000**	**100%**	**108.000.000**	**100%**	**108.000.000**	**100 %**	**108.000.000**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	9.930.500	6 Dokumen	75.000.000	6 Dokumen	75.000.000	6 Dokumen	75.000.000	6 Dokumen	75.000.000	6 Dokumen	75.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.999.250	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3.999.500	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.999.500	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2.942.500	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.999.800	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	7.615.250	4 Laporan	8.000.000	4 Laporan	8.000.000	4 Laporan	8.000.000	4 Laporan	8.000.000	4 Laporan	8.000.000	
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 laporan	0	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Prosentase tersusunnya dokumen administrasi keuangan Perangkat daerah yang tepat waktu**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**4.887.464.500**	**100%**	**5.019.679.740**	**100%**	**5.019.679.740**	**100%**	**5.019.679.740**	**100%**	**5.019.679.740**	**100 %**	**5.019.679.740**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang	37 orang/bulan	37 orang/bulan	4..875.483.000	37 orang/bulan	5.002.179.740	37 orang/bulan	5.002.179.740	37 orang/bulan	5.002.179.740	37 orang/bulan	5.002.179.740	37 orang/bulan	5.002.179.740	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 laporan	1 Laporan	1.981.500	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	2.500.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Prosentase terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan**	**100 %**		100 %	**100.000-**	100	**80.000.000**	100	**80.000.000**	100	**80.000.000**	100	**80.000.000**	100	**80.000.000**	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan			1O Orang	100.000	50 Orang	80.000.000	50 Orang	80.000.000	50 Orang	80.000.000	50 Orang	80.000.000	50 Orang	80.000.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

https://jdih.pemalangkab.go.id

	Perundang-Undangan															
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Prosentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran**	**100 %**			**128.300.000**	100%	**367.000.000**	100%	**367.000.000**	100%	**367.000.000**	100%	**367.000.000**	100 %	**367.000.000**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	5 paket	8 Paket	6.000.000	8 Paket	12.000.000	8 Paket	12.000.000	8 Paket	12.000.000	8 Paket	12.000.000	8 Paket	12.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			5 paket	0 -	-	20.000.000 -	-	20.000.000 -	-	20.000.000 -	-	20.000.000 -	-	20.000.000 -	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	35 paket	10 paket	10 Paket	6.000.000	10 Paket	7.500.000	10 Paket	7.500.000	10 Paket	7.500.000	10 Paket	7.500.000	10 Paket	7.500.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 paket	10 paket	10 Paket	50.000.000	10 Paket	75.000.000	10 Paket	75.000.000	10 Paket	75.000.000	10 Paket	75.000.000	10 Paket	75.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	3 paket	5 Paket	10.000.000	5 Paket	15.000.000	5 Paket	15.000.000	5 Paket	15.000.000	5 Paket	15.000.000	5 Paket	15.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokmn		1 Dokumen	6.300.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	7.500.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu			1 laporan	0		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 laporan	70 laporan	70 Laporan	50.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Perkantoran	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**46.600.000**	**100%**	**135.000.000**	**100%**	**135.000.000**	**100%**	**135.000.000**	**100%**	**135.000.000**	**100 %**	**135.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan			2 unit	**0**		**15.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	63 unit	25 Unit	21.600.000	25 Unit	40.000.000	25 Unit	40.000.000	25 Unit	40.000.000	25 Unit	40.000.000	25 Unit	40.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	26 unit	14 unit	1 Unit	25.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	0 -	1 Unit	90.000.000 -	1 Unit	30.000.000 -	1 Unit	30.000.000 -	1 Unit	30.000.000 -	1 Unit	30.000.000 -	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	0	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Prosentase terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang operasional kantor**	**100 %**	100%	**100 %**	**529.980.600**	**100%**	**548.147.000**	**100%**	**548.147.000**	**100%**	**548.147.000**	**100%**	**548.147.000**	**100 %**	**548.147.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	0	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0 -	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 Laporan	198.147.000	12 Laporan	198.147.000	12 Laporan	198.147.000	12 Laporan	198.147.000	12 Laporan	198.147.000	12 Laporan	198.147.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 Laporan	331.833.600	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	350.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Prosentase jumlah barang milik daerah yang terpelihara**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**137.951.600**	**100%**	**231.352.000**	**100%**	**231.352.000**	**100%**	**231.352.000**	**100%**	**231.352.000**	**100 %**	**231.352.000**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	31 unit	39	39 Unit	75.000.000	39 Unit	90.000.000	39 Unit	90.000.000	39 Unit	90.000.000	39 Unit	90.000.000	39 Unit	90.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-			-	5 unit	1.000.000	5 unit -	1.000.000	5 unit -	1.000.000	-5 unit	1.000.000	-5 unit	1.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	50 unit	50 Unit	22.949.760	50 Unit	30.352.000	50 Unit	30.352.000	50 Unit	30.352.000	50 Unit	30.352.000	50 Unit	30.352.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	1 Unit	40.001.840	1 Unit	90.000.000	1 Unit	90.000.000	1 Unit	90.000.000	1 Unit	90.000.000	1 Unit	90.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		1 unit-	-	1 Unit -	20.000.000 -	-1 Unit	20.000.000 -	-1 Unit	20.000.000 -	-1 Unit	20.000.000 -	-1 Unit	20.000.000 -	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Santunan kematian usia 55-65 tahun sejumlah 11914 x 16800 x 8 bulan	Terjaminnya keselamatan pekerja	Kegiatan :Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
2.	Meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan pendataan pekerja rentan (Pekerja Non Formal seperti Petani dan Nelayan) → 6.000 Petani tembakau	Meningkatnya couverage pekerja rentan		
3.	Pelaksanaan May Day	Terciptanya hubungan Industrial yang harmonis	Kegiatan :Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	
4.	Mengumpulkan stakeholder ketenagakerjaan: Bursa Kerja Khusus, LPKS (Lembaga Pelatihan Kerja Swasta), Perusahaan, Balai Latihan Kerja, P3MI (Perusahaan Penyalur Pekerja Migran Indonesia) → Rakor dengan Bursa Kerja Khusus, LPKS (Lembaga Pelatihan Kerja Swasta), Perusahaan, Balai Latihan Kerja, P3MI (Perusahaan Penyalur Pekerja Migran Indonesia)			
5	Pelaksanaan Job Fair	Mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran	Kegiatan :Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Sub Kegiatan :Job Fair/Bursa Kerja	
6.	Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	Meningkatnya wawasan Siswa SMK/SMU kelas 12 dalam menghadapi Dunia Usaha dan Dunia Industri	Kegiatan : Pelayanan Anatar Kerja Sub Kegiatan :Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	
6	Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi		Kegiatan :Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	

https://jdih.pemalangkab.go.id

7	Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan		Kegiatan :Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :	
8	Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur	Pemberdayaan Masyarakat penganggur dan setengah penganggur dalam aktifitas pekerjaan	Kegiatan; Pelayanan Antar Kerja Sub Kegiatan: Perluasan Kesempatan Kerja	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Tenaga Kerja

Kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja standar yang ditetapkan. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan ditetapkan guna menajmin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Sejalan dengan penilaian akuntabilitas kinerja intansi pemerintah, maka indikator kinerja digunakan sebagai instrumen dalam pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, sejalan dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029.

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama PD

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	TPT	%	6,19-6,13	6,13-6,07	6,07-6,01	6,01-5,95	5,95-5,89	5,89-5,83	IUP
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		58,19	58.44	59.69	60.94	62.19	62.59	IUP
3.	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kabupaten/ kota		56,03	56,69	57.32	57,95	58.58	59.64	IUP
4.	TPAK	%	72,6	72,96	73,32	73,68	74,05	74,41	IKU
5.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	27,39	27,65	27,92	28,19	28,46	28,73	IKU
6.	Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah	%	6,48	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	IKU

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	1,18	2,03	2,78	3,45	4.05	4,6	
3.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota	%	72,43	73,13	73,83	74,54	75,26	75,98	
4.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigran	%	8,57	11,43	14,3	20	22,87	28,57	
6.	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota	%	6,5	6,5	6,5	6,6	6,6	6,6	
7.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	10	10	10	10	10	10	
8.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Indeks	125	125	125	125	125	125	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB V
PENUTUP

1. Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 merupakan rencana pembangunan selama 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Pemalang. Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif. Renstra dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang untuk kurun waktu lima tahun. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang, adalah sebagai berikut :

2.2.2.1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah.

2.2.2.2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang serta para pihak terkait dalam pembanagunan di bidanag ketenagakerjaan.

2.2.2.3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang.

2.2.2.4. Sebagai acuan dalam penyusunan dok ren opd tahunan

2. Kaidah pelaksanaan yang perlu diatur dalam pelaksanaan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat, bidang, dan jabatan fungsional pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang agar mendukung pencapaian target-target Renstra Tahun 2025-2029 dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang dengan sebaik-baiknya;

b. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 kemudian digunakan juga sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pemalang Tahun 2026-2030.

c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, maka perlu dilakukan pengendalian dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

d. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang memungkinkan untuk diubah berdasarkan ketentuan, sebagai berikut:

1) Berdasarkan hasil pengendalian, monitoring, dan evaluasi apabila proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah.

2) Hasil pengendalian, monitoring, dan evaluasi menunjukkan substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3) Terjadi perubahan mendasar (bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial politik, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan/atau terjadi perubahan kebijakan ditingkat nasional

3. Pedoman Transisi

Sebagai pedoman pada masa transisi, yaitu pada saat Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2030–2034 belum tersusun, maka untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta mengisi kekosongan Rencana Kerja setelah Renstra berakhir, maka Renstra ini menjadi pedoman penyusunan Renja dan RAPBD Tahun 2030.

Tim Penyusun

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN

https://jdih.pemalangkab.go.id

CASCADING DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG

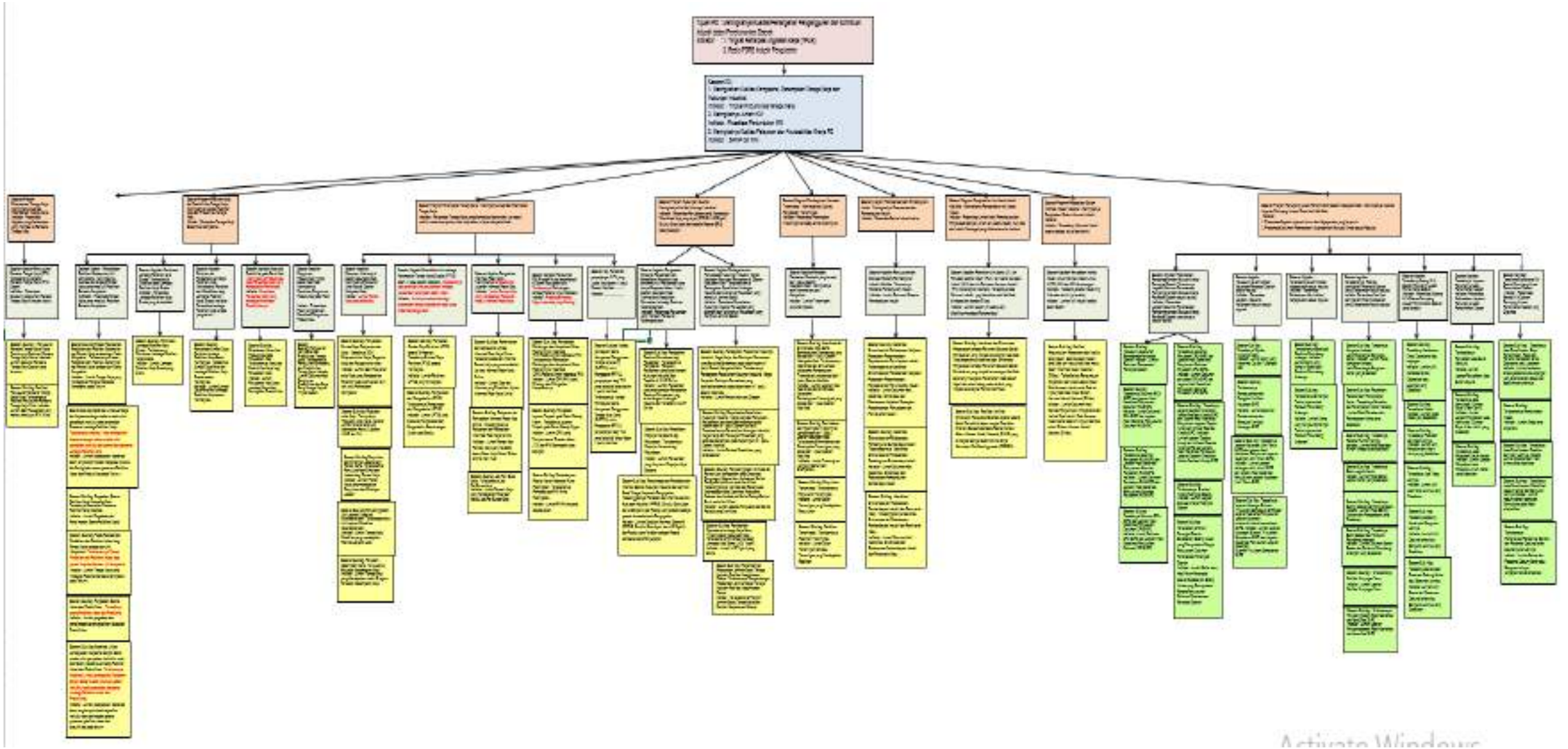

Activate Windows

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi pada era globalisasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu teknologi yang mengalami kemajuan pesat adalah teknologi informasi yang memberikan kemudahan dalam memperoleh berita dan informasi. Komunikasi dan informasi merupakan dua aspek fundamental yang menjadi landasan bagi perkembangan masyarakat modern.

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian pesan atau informasi dari satu individu kepada individu lainnya untuk mencapai pemahaman bersama. Sementara itu, informasi merupakan data atau fakta yang telah diolah sehingga memiliki makna dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan maupun pengembangan pengetahuan.

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi dan mengelola pengetahuan. Melalui inovasi teknologi seperti telekomunikasi, jaringan internet, dan perangkat digital, penyebaran informasi dapat dilakukan secara cepat, efisien, dan tanpa batasan ruang maupun waktu. Kondisi ini memungkinkan terjadinya pertukaran ide, kolaborasi, serta akses terhadap sumber pengetahuan secara global.

Dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, pemerintahan, bisnis, dan kesehatan, teknologi komunikasi dan informasi menjadi alat strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Misalnya, penerapan sistem informasi berbasis digital memungkinkan pengelolaan data yang lebih akurat dan transparan, sementara teknologi komunikasi memperlancar koordinasi antar pihak.

Namun demikian, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi memerlukan tata kelola yang baik agar penyebaran informasi dapat dipercaya dan komunikasi berlangsung efektif. Tantangan seperti penyebaran informasi palsu (misinformasi) dan isu keamanan data harus menjadi perhatian serius untuk menjaga integritas dan manfaat teknologi tersebut. Oleh karena itu, penguasaan serta pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi secara bijaksana menjadi kunci

https://jdih.pemalangkab.go.id

dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan kemajuan masyarakat di era digital.

Sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan, diperlukan perencanaan strategis yang matang. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh organisasi untuk menetapkan tujuan jangka menengah serta langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan tersebut. Renstra mencakup visi, misi, analisis situasi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam periode waktu tertentu.

Landasan hukum penyusunan Renstra ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan pentingnya dokumen perencanaan pembangunan terintegrasi untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Selain itu, Renstra ini juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa perangkat daerah harus menyusun dokumen perencanaan lima tahunan yang disebut dengan Renstra. Renstra perangkat daerah menjadi instrumen strategis lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas.

Penyusunan Renstra ini juga mengacu pada Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta penyelarasan antara Renstra perangkat daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam hal ini, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029 akan menjadi penjabaran teknis visi dan misi kepala daerah terpilih, hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, yang dituangkan dalam RPJMD.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang (Diskominfo) wajib menyusun dokumen Renstra yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029. Diskominfo Kabupaten Pemalang merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian sebagaimana

https://jdih.pemalangkab.go.id

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.

Pembentukan perangkat daerah ini bertujuan meningkatkan efektivitas organisasi, mengoptimalkan pelayanan publik, menyatukan berbagai fungsi, serta menghapus struktur dan tugas yang tidak efisien, sehingga organisasi mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

Renstra Diskominfo Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029. Dokumen ini menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian. Rencana tersebut dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan selama periode lima tahun.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan daerah dapat dilihat pada bagan berikut.

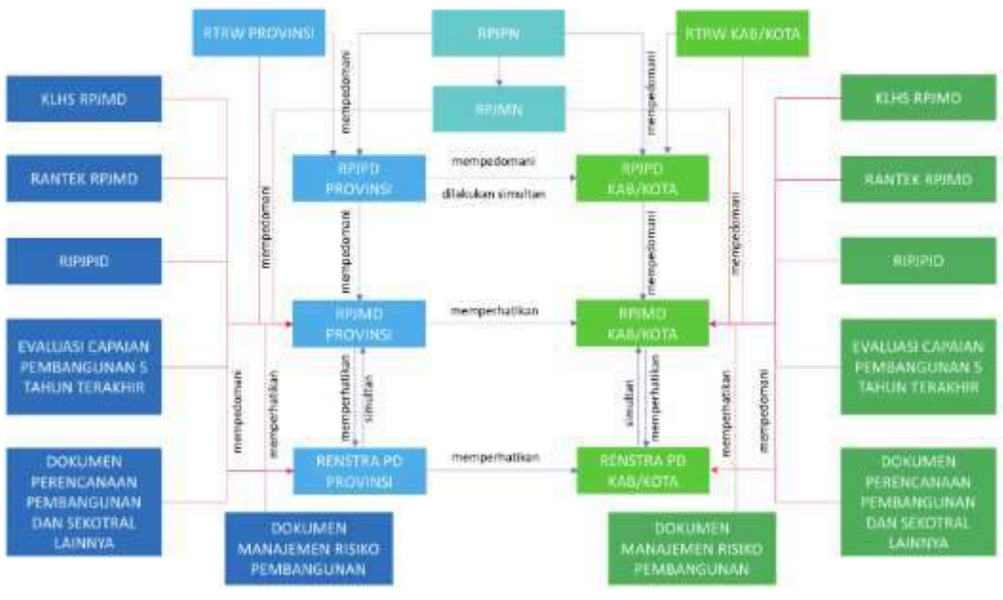

Gambar 1.1 : Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra tersebut juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun

https://jdih.pemalangkab.go.id

evaluasi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.

Selanjutnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029. Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dapat digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut:

Gambar 1.2 : Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

https://jdih.pemalangkab.go.id

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

https://jdih.pemalangkab.go.id

10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038;
16. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
17. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

https://jdih.pemalangkab.go.id

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.
19. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang; dan
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud.

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang 2025 – 2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu 5 tahun, yaitu :

1. Sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang;
2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang selama kurun waktu 5 tahun (2025 – 2029).

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam jangka 5 (lima) tahun yaitu tahun 2025 - 2029;
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) terkait konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang;
3. Sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029.

https://jdih.pemalangkab.go.id

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN.

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

Bab ini memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang, sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang, capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang pada renstra periode sebelumnya, mengulas kelompok sasaran layanan. Bab ini juga memuat permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dan isu strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

Bab ini memuat tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang tahun 2025 – 2029, sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 serta strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang tahun 2025 – 2029.

Bab IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Pada bagian ini diuraikan tentang uraian program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja indikator, target dan pagu indikatif dan sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah. Serta memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang tahun 2025 – 2029 melalui indikator Kinerja Utama (IKU)

https://jdih.pemalangkab.go.id

dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

2.1.1. Tugas, fungsi dan struktur Dinas Komunikasi dan Informatika :

Dalam rangka memudahkan pemahaman terhadap isi dan muatan dari gambaran umum kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang serta Peraturan Bupati Nomor &5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatiaka Kabupaten Pemalang yang telah mengalami perubahan yaitu Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organsisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri atas :
    1) Subbagian Bina Program dan Keuangan, dan
    2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
d. Bidang Penyelenggaraan *e-Government*;
e. Bidang Statistik dan Persandian;
f. UPTD, dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional

https://jdih.pemalangkab.go.id

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing komponen Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Diskominfo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas fungsi tersebut, Kepala Diskominfo menyelenggarakan fungsi :

1) Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-government, serta statistik dan persandian;
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-government, serta statistik dan persandian;
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-government, serta statistik dan persandian;
4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretaris Diskominfo mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Diskominfo. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1) Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Diskominfo;
2) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Diskominfo;
3) Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Diskominfo;

https://jdih.pemalangkab.go.id

4) Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Diskominfo;
5) Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Diskominfo;dan
6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

c. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :

1) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
2) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

d. Kepala Bidang Penyelenggaraan *e-Government*

Kepala Bidang Penyelenggaraan *e-Government* mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyelenggaraan *e-Government.*

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Penyelenggaraan *e-Government* menyelenggarakan fungsi :

1) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyelenggaraan e-Government;
2) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

e. Kepala Bidang Statistik dan Persandian

Kepala Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Statistik dan Persandian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi :

https://jdih.pemalangkab.go.id

1) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Statistik dan Persandian;
2) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

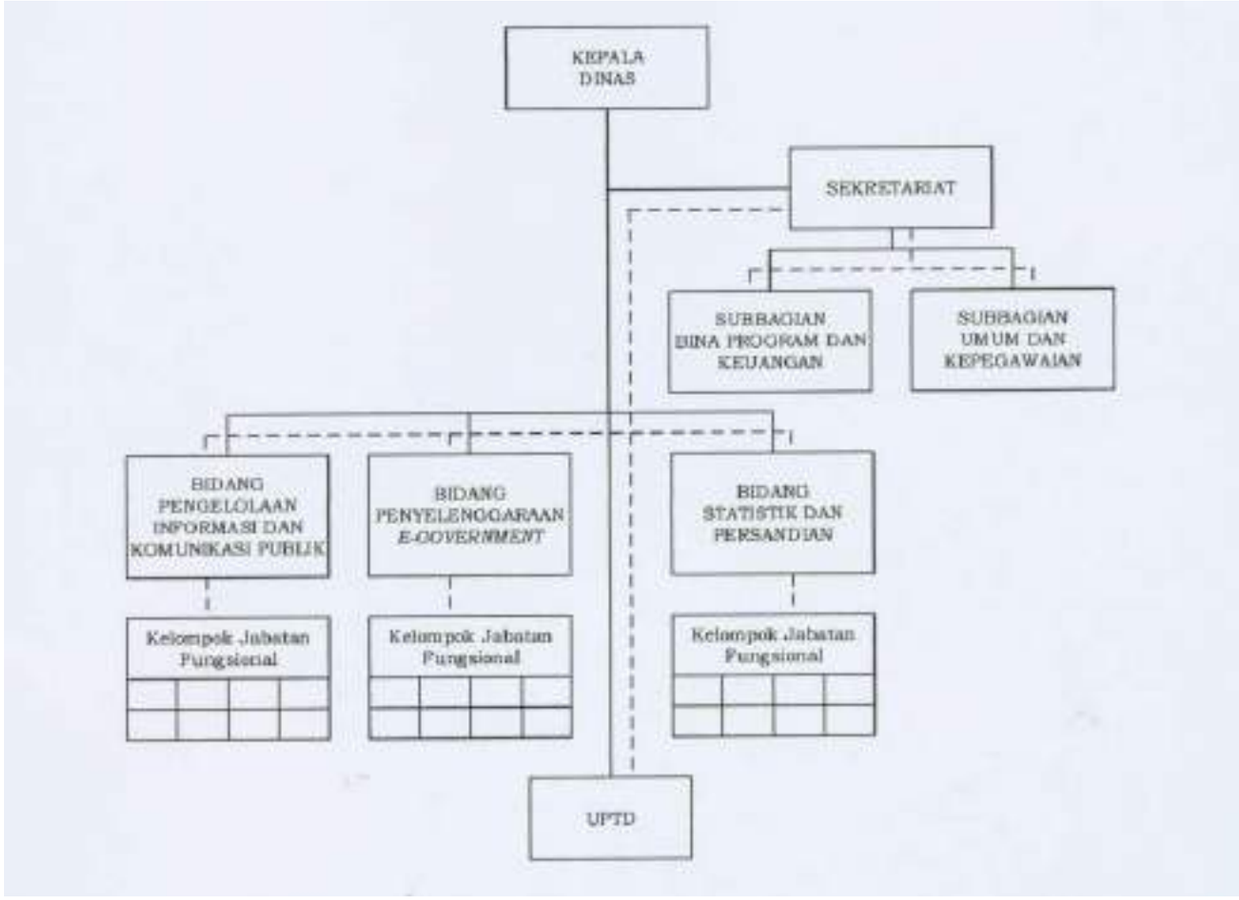

Gambar 2.1 : Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.

Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya aset. Masing-masing sumber daya tersebut dapat dijelaskan melalui uraian sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Aparatur pada Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang pada tahun 2025 tercatat sejumlah 81 (delapan puluh satu) Pegawai dengan perincian sebagai berikut

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2. 1.
Data Pegawai berdasarkan Golongan Tahun 2025

No.	Golongan	L	P	Jumlah
1.	Golongan IV	4	1	5
2.	Golongan III	15	8	23
3.	Golongan II	4	-	4
4.	Golongan I	-	-	-
5.	Non ASN	35	14	49

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang 2025

Berdasarkan latar belakang pendidikan formal yang dimiliki, pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang sebagian besar berpendidikan S1 sebanyak 42 orang, S2 sebanyak 6 orang, D4 sebanyak 2 orang, D3 sebanyak 4 orang dan SMA sebanyak 26 orang, dan SD sebanyak 1 orang. Data pendidikan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2.
Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1.	S2 / Magister	4	2	-	-	6
2.	S1 / Sarjana	8	3	21	10	42
3.	Diploma IV	-	1	1	-	2
4.	Diploma III	2	-	1	1	4
5.	Diploma II	-	-	-	-	
6.	Diploma I	-	-	-	-	
7.	SMA/ Sederajat	10	2	11	3	26
8.	SMP/ Sederajat	-	-	-	-	
9.	SD	-	-	1	-	1
	Jumlah Total	24	8	35	14	81

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang 2025

Dalam rangka melaksanakan pelayanan dalam komunikasi dan informatika kepada masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang didukung dengan sumber daya manusia sejumlah 81 (delapan puluh dua), yang terdiri atas ASN/PNS sejumlah 32 (tiga puluh tiga) orang (39,51%), non ASN sejumlah 49 (empat puluh sembilan) orang (60,49%).

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa jumlah ASN dibandingkan dengan seluruh pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang hanya sebesar 39,51% dari jumlah keseluruhan yaitu 81 (delapan puluh dua) orang pegawai yang ada. Kekurangan pegawai yang terjadi selama ini ditutup dengan menggunakan tenaga honorer.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan, sumber daya manusia pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang tergambar sebagaimana tabel 2.3 berikut :

Tabel 2. 3.
Jumlah Pegawai Diskominfo Kabupaten Pemalang
berdasarkan Golongan dan Jabatan

No.	Golongan	Jabatan	Jumlah Pegawai	Pendidikan Terakhir
1.	IV C	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	1	S-2 (Magister Manajemen Pembangunan Daerah)
2.	IV B	Sekretaris	1	S-2 (Magister Ilmu Komputer)
3.	IV A	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	1	S-1 Komunikasi
4.	IV A	Kepala Bidang Penyelenggaraan *e-Government*	1	S-2 (Magister Ilmu Ekonomi)
5.	III D	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1	S-2 (Magister Manajemen)
6.	IV A	Penelaah Teknis Kebijakan	1	S-2 (Teknik)
7.	III D	Sandiman Muda	1	S-1 Manajemen
8.	III D	Stastisi Muda	1	S-1 Ilmu Hukum
9.	III D	Kasubbag Bina Program dan Keuangan	1	S-2 (Magister Sains Akuntansi)
10.	III C	Pengolah Data dan Informasi	1	S-1 Manajemen Perusahaan
11.	III C	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	1	D-IV Penyiaran
12.	III C	Pranata Komputer Ahli Pertama/Pertama	1	S-1 Teknik Informatika
13.	III C	Pengolah Data dan Informasi	1	S-1 Ilmu Pemerintahan
14.	III/c	Penelaah Teknis Kebijakan	1	S-1 Ekonomi Manajemen
15.	III/b	Pengadministrasi Perkantoran	1	SMU IPS
16.	III/b	Pengadministrasi Perkantoran	1	SMA A.3/IPS
17.	III/b	Pengadministrasi Perkantoran	1	SMA IPA
18.	III/b	Pranata Komputer Ahli Pertama/Pertama	1	S-1 Sistem Informasi
19.	III/b	Pengolah Data dan Informasi	1	SMU IPS
20.	III/b	Pranata Komputer	1	SMA A.1/Fisika

https://jdih.pemalangkab.go.id

No.	Golongan	Jabatan	Jumlah Pegawai	Pendidikan Terakhir
		Ahli Muda/Muda		
21.	III/b	Pengadministrasi Perkantoran	1	S-1 Manajemen
22.	III/b	Pengolah Data dan Informasi	1	S-1 Ilmu Pemerintahan
23.	III/b	Pranata Komputer Ahli Pertama/Pertama	1	S-1 Sistem Informasi
24.	III/b	Pranata Komputer Ahli Pertama/Pertama	1	S-1 Teknik Komputer
25.	III/a	Pengadministrasi Perkantoran	1	SMEA Tata Niaga
26.	III/a	Pengadministrasi Perkantoran	1	SMA IPA
27.	III/a	Pengolah Data dan Informasi	1	STM Mesin
28.	III/a	Pengolah Data dan Informasi	1	SMEA Tata Usaha
29.	II/d	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil/Pelaksana	1	D-III Ilmu Komunikasi
30.	II/d	Operator Layanan Operasional 3	1	SMEA Akuntansi
31.	II/d	Pengolah Data dan Informasi	1	SMEA Perkantoran
32.	II/c	Pengadministrasi Perkantoran	1	Paket C

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang 2025

Sementara itu dalam mendukung pelaksanaan tugas berikut sarana dan prasaran yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang

Tabel 2. 4.
Sarana dan Prasarana Diskominfo Kabupaten Pemalang
Tahun 2024

No.	**Jenis Sarana dan Prasarana**	**Satuan**	**Kondisi**		**Jumlah**
			Baik	**Rusak**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	8	1	9
2	Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	15	3	18
3	Komputer laptop	Unit	40	7	47
4	Komputer All In One	Unit	46	19	65
5	Komputer Desktop Built Up	Unit	3	9	12
6	Komputer Desktop Rakitan	Unit	5	43	48
7	Komputer Server	Unit	16	12	28
8	AC	Unit	41	5	46
9	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	Unit	1		1

https://jdih.pemalangkab.go.id

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
10	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Unit	10		10
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	12		12
12	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Unit	2		2
13	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Unit	1		1
14	Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain (dst)	Unit	14		14
15	Pagar Permanen	Unit	1		1
16	Selasar	Unit	1		1
17	Printer	Unit	72	7	79
18	Scaner	Unit	1	2	3
19	Printer Foto Copy	Unit	2		2
20	Foto Copy	Unit		1	1
21	Monitor	Unit		64	64
22	Televisi	Unit	28	2	30
23	Stavolt	Unit		23	23
24	UPS	Unit		3	3
25	VCD Player	Unit		1	1
26	HUB Jaringan	Unit		13	13
27	FM Digital	Unit		4	4
28	Dispenser Kecil	Unit		3	3
29	Telephone IP	Unit	12		12
30	Routers WIFI	Unit		2	2
31	Kursi Besi Gratia	Unit		8	8
32	Kursi Besi Biasa	Unit		3	3
33	Speaker Pasif	Unit		2	2

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode 2020–2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Capaian tersebut tergambar melalui berbagai indikator kinerja strategis yang mencerminkan kemajuan transformasi digital, keterbukaan informasi publik, serta penguatan infrastruktur dan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengalami peningkatan dari nilai 2,23 pada tahun 2020 menjadi 3,04 pada tahun 2024, dengan rata-rata capaian mencapai 90,21 persen terhadap target Renstra. Peningkatan ini menunjukkan

https://jdih.pemalangkab.go.id

keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas penerapan sistem digital pada berbagai aspek pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, sekaligus memperkuat efisiensi birokrasi berbasis teknologi informasi.

Pada aspek infrastruktur jaringan, persentase network terintegrasi menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Sejak tahun 2021 hingga 2024, realisasi capaian mencapai 100 persen, melampaui target setiap tahunnya dengan rata-rata persentase capaian di atas 120 persen. Hal ini menandakan bahwa jaringan komunikasi antarperangkat daerah telah terhubung secara optimal dan mendukung implementasi layanan berbasis digital secara terpadu.

Dalam bidang keamanan informasi, tingkat kematangan keamanan informasi (Indeks KAMI) juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Nilai kematangan meningkat dari 20 pada tahun 2020 menjadi 35 pada tahun 2024, dengan capaian kinerja yang melampaui target, yaitu mencapai rata-rata di atas 1.000 persen pada tahun-tahun awal implementasi. Capaian ini mencerminkan peningkatan kesadaran dan kemampuan teknis perangkat daerah dalam menjaga keamanan sistem dan data pemerintahan dari potensi ancaman siber.

Sementara itu, nilai keterbukaan informasi publik terus meningkat secara konsisten dari 74,83 pada tahun 2020 menjadi 85,17 pada tahun 2024, dengan capaian di atas 100 persen dari target. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta memastikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik secara terbuka dan tepat waktu.

Selain itu, penguatan fungsi statistik sektoral juga menunjukkan hasil yang optimal. Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan setiap tahunnya selama periode 2020–2024. Hal ini menandakan bahwa pengelolaan data statistik telah berjalan dengan baik dan digunakan secara efektif dalam mendukung proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Dari sisi literasi dan partisipasi publik, persentase penduduk yang terpapar informasi publik mengalami peningkatan pesat dari 17,2 persen pada tahun 2020 menjadi 78 persen pada tahun 2024, dengan capaian akhir mencapai 141,82 persen dari target. Capaian ini

https://jdih.pemalangkab.go.id

menggambarkan keberhasilan strategi diseminasi informasi publik yang dijalankan secara luas melalui berbagai saluran komunikasi, baik media digital maupun konvensional.

Indikator yang mengalami kemajuan pesat adalah persentase ketersediaan informasi publik, yang meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 85,17 persen pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan upaya konsisten pemerintah daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik, baik melalui penguatan kanal informasi resmi maupun optimalisasi teknologi digital sebagai media komunikasi publik. Dampak dari upaya tersebut terlihat dari meningkatnya proporsi penduduk yang mengakses informasi publik, yang naik signifikan hingga mencapai 80 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin aktif dalam mencari dan memanfaatkan informasi sebagai bagian dari partisipasi mereka dalam pembangunan daerah.

Transformasi digital juga menjadi tonggak penting dalam capaian kinerja Diskominfo Kabupaten Pemalang. Melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, persentase layanan publik yang diselenggarakan secara daring dan terintegrasi berhasil mencapai 100 persen pada tahun 2024. Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik dan memahami kebijakan serta program prioritas pemerintah meningkat hingga 78,83 persen, menandakan efektivitas strategi komunikasi publik yang dijalankan secara terencana dan berkelanjutan.

Peningkatan akses informasi juga didukung dengan penyediaan informasi tentang sumber daya pelayanan yang mencapai 100 persen, serta akses publik terhadap informasi keuangan daerah yang meningkat hingga 91 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan partisipatif.

Dari sisi infrastruktur digital, tingkat keterpaduan jaringan meningkat hingga 88 persen, sedangkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo. Kondisi ini memperkuat kapasitas internal pemerintah daerah dalam berbagi data, berkoordinasi, serta

https://jdih.pemalangkab.go.id

mengimplementasikan layanan publik berbasis teknologi secara lebih efektif dan efisien.

Dalam bidang statistik sektoral, capaian juga menunjukkan arah kemajuan. Persentase statistik sektoral yang tersedia sesuai standar meningkat menjadi 40 persen, dan seluruh OPD, yaitu 100 persen, telah memanfaatkan data statistik baik dalam penyusunan perencanaan maupun dalam proses evaluasi pembangunan daerah. Hal ini menjadi indikator bahwa pengelolaan data dan informasi telah menjadi bagian integral dalam perencanaan berbasis bukti di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Aspek keamanan informasi pemerintah daerah juga menunjukkan perbaikan yang signifikan. Persentase konten informasi yang telah diamankan meningkat pesat hingga mencapai 100 persen pada tahun 2024, menunjukkan keberhasilan dalam penerapan sistem pengamanan data dan jaringan. Sementara itu, tingkat keamanan informasi pemerintah meningkat secara bertahap hingga mencapai 34 persen, yang menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam memperkuat perlindungan terhadap ancaman siber dan kebocoran data.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang selama periode 2020–2024 menunjukkan hasil yang sangat positif. Peningkatan pada berbagai indikator utama menegaskan bahwa arah kebijakan transformasi digital, keterbukaan informasi, serta keamanan data telah berada pada jalur yang tepat. Keberhasilan ini menjadi dasar yang kuat bagi Diskominfo Kabupaten Pemalang dalam merumuskan arah kebijakan strategis periode 2025–2029 untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2. 5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pemalang

Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun -					Persentase Capaian Pada Tahun - (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE		3,34	3,34	3,35	3,36	3,37	2,23	3,34	2,23	2,94	3,04	66,77	100,00	66,57	87,50	90,21
Persentase Network Terintegrasi		70,73	74	78	82	88	71,00	100	100	100	100	100,38	135,14	128,21	121,95	113,64
Tingkat/Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)		2	2,2	2,3	2,4	2,5	20	20	40	32,50	35,00	1.000,00	909,09	1.739,13	1.354,17	1.400,00
Indeks/Nilai Keterbukaan Informasi Publik		74,83	76	78	79	80	74,83	76	78	79	85,17	100,00	100,00	100,00	100,00	106,46
Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas		0,5	1	2	4	5	0,5	1	2	4	5	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Penduduk yang terpapar Informasi publik		17,2	25	35	45	55	17,2	25	35	45	78	100,00	100,00	100,00	100,00	141,82
Persentase ketersediaan informasi publik	Indeks						66,00	70	74	80	85,17					
Proporsi penduduk yang mengakses informasi publik	%						1	5,00	15	28	80					
Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi	%						66,00	41,18	75	80	100					
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%						27,00	51,30	79	80	78,83					
Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%						40,00	50	50	100	100					
Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%						30,00	40	70	91	91					
Persentase *Network* terintegrasi	%						70,73	70,73	72	73	88					
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%						70,73	70,73	100	100	100					

https://jdih.pemalangkab.go.id

Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun -					Persentase Capaian Pada Tahun - (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase statistik sektoral yang tersedia sesuai standar	%						2	22	31	32	40					
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%						100	100	100	100	100					
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%						100	100	100	100	100					
Persentase konten informasi yang telah diamankan (%)	%						20	41	40	96,3	100					
Tingkat keamanan informasi pemerintah	%						20	20	40	32,5	34					

Sumber : Diskominfo Kabupaten Pemalang, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan pola realisasi anggaran yang relatif stabil dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Persentase realisasi mencapai 79,52% pada 2020, kemudian meningkat tajam menjadi 119,49% pada 2021, yang menunjukkan adanya penambahan kebutuhan atau penyesuaian anggaran di luar rencana awal. Pada 2022 dan 2023, realisasi tetap berada di atas rencana dengan capaian 105,29% dan 112,33%, menandakan program ini termasuk prioritas operasional dengan tingkat penyerapan sangat baik. Tren ini mengindikasikan bahwa kebutuhan biaya penunjang pemerintahan seringkali melebihi rencana awal, sekaligus menunjukkan kemampuan OPD dalam mengakselerasi pemenuhan kebutuhan layanan administratif.

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik memperlihatkan ketidakstabilan realisasi dari tahun ke tahun. Pada 2021–2024, realisasi anggaran terlihat fluktuatif dan tidak disertai data persentase resmi. Berdasarkan perbandingan nominal, terlihat bahwa pada beberapa tahun realisasi jauh lebih rendah dari rencana, terutama pada 2022 (sekitar Rp1,65 miliar dari rencana Rp3,57 miliar). Pola ini menunjukkan adanya inefisien perencanaan atau keterbatasan pelaksanaan program, misalnya karena penyesuaian kebijakan, hambatan teknis, atau realokasi anggaran. Ketidakstabilan ini bisa berdampak pada kualitas diseminasi informasi publik, yang menjadi salah satu fungsi penting dalam komunikasi pemerintahan.

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika menunjukkan penurunan persentase realisasi anggaran dari tahun ke tahun. Pada 2020 realisasi berada di kisaran 92,89%, namun turun menjadi 70,73% pada 2021, kemudian anjlok ke 46,48% pada 2022, dan sedikit membaik menjadi 66,60% pada 2023. Pola ini menandakan adanya tantangan dalam implementasi kegiatan, seperti keterlambatan pengadaan aplikasi, perubahan prioritas digitalisasi, atau kurangnya kesiapan perangkat teknis. Rendahnya realisasi dapat berdampak pada lambatnya modernisasi sistem informasi pemerintahan, yang seharusnya menjadi pondasi transformasi digital daerah.

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral tampak tidak optimal dalam penyerapan anggaran. Realisasi pada beberapa tahun

https://jdih.pemalangkab.go.id

tercatat sangat rendah, misalnya pada 2020 hanya Rp147.712 dari rencana hampir Rp350 juta. Tahun berikutnya pun realisasi tidak meningkat signifikan dan tetap jauh dari nilai rencana. Minimnya penyerapan anggaran mengindikasikan bahwa kegiatan statistik sektoral belum dijalankan secara maksimal, baik karena kapasitas SDM, kurangnya pemahaman kebutuhan data, atau masih terbatasnya implementasi kegiatan statistik di perangkat daerah. Kondisi ini berpotensi menghambat penyediaan data sektoral yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan.

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi menunjukkan fluktuasi besar dalam realisasi anggaran. Tahun 2021 mencatat realisasi yang relatif tinggi yaitu 106,41%, namun kemudian menurun menjadi 70,53% pada 2022 dan kembali turun drastis menjadi 51,66% pada 2023. Pola ini mengindikasikan bahwa keamanan informasi belum menjadi prioritas stabil, padahal kebutuhan penguatan persandian sangat penting untuk mendukung keamanan siber pemerintah daerah. Fluktuasi tajam juga mengindikasikan perencanaan yang kurang konsisten atau tantangan dalam pelaksanaan kegiatan teknis yang berbasis sistem pengamanan.

Secara keseluruhan, pola realisasi anggaran menunjukkan bahwa tidak semua program memiliki perencanaan dan implementasi yang konsisten. Program penunjang pemerintahan relatif stabil dan selalu mencapai target, bahkan melebihi. Sebaliknya, program yang bersifat teknis—khususnya pengelolaan aplikasi, statistik sektoral, dan persandian—menunjukkan kapasitas pelaksanaan yang masih perlu diperkuat. Beberapa program strategis menunjukkan realisasi rendah yang dapat berdampak pada efektivitas pelayanan publik dan transformasi digital daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2. 6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Persentase Realisasi Anggaran (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		9.285.730.100	7.586.000.000	7.586.000.000	7.586.000.000		7.383.728.000	9.064.526.709	7.987.427.645	8.521.273.074		79,52	119,49	105,29	112,33
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		4.060.387.000	3.567.383.000	3.570.000.000	3.575.000.000	-	3.771.504	2.523.113.417	1.659.435.263	2.380.824.289					
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		6.030.000.000	5.230.000.000	5.235.000.000	5.235.000.000		3.771.504.000	5.565.255.978	3.692.199.089	2.704.520.550		92,89	70,73	46,48	66,60
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		349.796.000	350.000.000	355.000.000	360.000.000		147.712	241.724.345	136.101.940	127.221.469					
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		292.796.900	293.000.000	295.000.000	295.000.000		5.853.840.000	187.624.951	113.030.025	275.083.965		97,08	106,41	70,53	51,66

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.1.4. Kelompok sasaran layanan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Kelompok sasaran layanan dari dinas ini meliputi :

1. Masyarakat Umum

   Layanan informasi publik, layanan aduan masyarakat, layanan akses internet gratis melalui WiFi publik, serta sosialisasi literasi digital ditujukan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pemalang.

2. Perangkat Daerah (OPD/Instansi Pemerintah Daerah)

   Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi bagi seluruh perangkat daerah, seperti penyediaan jaringan internet antar OPD, pengelolaan aplikasi layanan pemerintahan (*e-Government*), sistem persuratan elektronik, dan pengelolaan website resmi perangkat daerah.

3. Media Massa dan Insan Pers

   Dalam hal keterbukaan informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan media. Layanan ini mencakup publikasi kegiatan pemerintah, konferensi pers, serta pengelolaan informasi yang akurat dan terpercaya.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah

1. Mitra Internal Pemerintah Kabupaten Pemalang

a. Seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) : sebagai produsen data sektoral, pengguna layanan TIK, dan subjek keterbukaan informasi publik.

b. Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan Setda : koordinasi publikasi, informasi, dan dokumentasi kegiatan pimpinan daerah.

c. Bappeda : sinkronisasi data sektoral, sistem informasi perencanaan, dan integrasi dengan RPJMD.

d. Inspektorat Daerah : pembinaan tata kelola SPBE, pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan data.

e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil : pengolahan data kependudukan untuk mendukung layanan publik dan big data.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2. Mitra Eksternal Pemerintah Pusat & Provinsi
   a. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI : regulasi, kebijakan, serta dukungan infrastruktur TIK dan literasi digital.
   b. BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) : keamanan siber dan persandian pemerintah daerah.
   c. KemenPAN-RB : evaluasi SPBE dan tata kelola pelayanan publik berbasis elektronik.
   d. BPS (Badan Pusat Statistik) : koordinasi statistik sektoral, Satu Data Indonesia, dan pembinaan data resmi.
   e. Diskominfo Provinsi Jawa Tengah : sinkronisasi kebijakan komunikasi, informatika, dan keterbukaan informasi publik di tingkat provinsi.
3. Mitra Non-Pemerintah
   a. Media Massa (cetak, elektronik, online) : penyebaran informasi kebijakan dan program Pemkab Pemalang.
   b. Perguruan Tinggi/Universitas : riset, pengembangan aplikasi, dan literasi digital.
   c. Komunitas IT & Start-up Lokal : inovasi aplikasi layanan publik dan *smart city*.
   d. Organisasi Masyarakat & KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) : perantara informasi ke masyarakat desa.
   e. Asosiasi/LSM di bidang keterbukaan informasi dan advokasi digital.
   f. Perusahaan Telekomunikasi & Penyedia Infrastruktur Internet : dukungan jaringan komunikasi dan data center.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang

1) Permasalahan Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat

https://jdih.pemalangkab.go.id

untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang lebih baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang sebagai PPID utama Pemerintah Kabupaten Pemalang mengupayakan keterbukaan informasi publik di seluruh badan publik dapat berjalan dengan baik, permasalahan yang timbul dalam implementasi UU Keterbukaan informasi publik adalah kesiapan seluruh badan publik untuk menyediakan seluruh layanan informasi publik yang belum menyeluruh, belum semua badan publik termasuk dalam kategori informatif. Hal ini bisa sebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang UU KIP, hingga implementasi yang belum efektif di berbagai badan publik. Dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan sebagai leading sektor layanan pengaduan di Pemerintah Kabupaten Pemalang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang senantiasa memberikan respon dan tanggapan yang cepat pada aduan yang masuk. Namun pada penyelesaian aduan yang melibatkan OPD lain terkadang masih ada beberapa respon yang lambat dari pengelola aduan di masing-masing OPD sehingga perlu lebih ditingkatkan komitmen dari seluruh OPD di Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk memberikan dukungan pada pengeloaan dan penyelesaian aduan.

2) Permasalahan Pengembangan SPBE

Pelaksanaan SPBE memerlukan fondasi dan regulasi yang kuat dan menyeluruh agar dapat berjalan dengan konsisten, terukur, dan berkelanjutan di instansi pemerintahan. Namun hingaa saat ini ketersediaan regulasi terkait pelaksanaan SPBE belum semua dapat terpenuhi. Dalam beberapa tahun terakhir, pengembangan SPBE banyak menghadapi berbagai permasalahan seperti mengintegrasikan berbagai sistem digital yang berjalan secara terpisah, masih terjadinya tumpang tindih fungsi bisnis pemerintahan, adanya duplikasi infrastruktur dan sistem informasi, standardisasi TIK yang belum optimal, pemanfaatan data dan informasi yang bisa dibagai pakai yang belum maksimal

https://jdih.pemalangkab.go.id

sehingga arsitektur SPBE yang tepat dan terarah memberikan peluang untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan terintegrasi dengan baik dan dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan terukur. Dengan adanya arsitektur yang terintegrasi, data dapat diakses dan dianalisis dengan lebih cepat, yang pada akhirnya akan meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Sehingga dalam hal ini diperlukan kolaborasi/cross cutting dengan beberapa perangkat daerah dalam memberikan dukungan pada pelaksanaan dan implementasi SPBE. Sementara itu, pengembangan SPBE dalam aspek infrastuktur telematika, masalah yang terjadi adalah perkembangan teknologi menuntut penyesuaian peningkatan keterampilan SDM pengelola, meningkatnya ancaman keamanan siber, ketidakpastian ekonomi dapat mengganggu perencanaan penganggaran terkait infrastruktur jaringan, perkembangan kebutuhan data dan informasi yang meningkat membutuhkan penyesuaian kemampuan kapasitas infrastruktur jaringan, perlunya peremajaan perangkat jaringan yang usia pemakaiannya sudah melebihi standar, ketergantungan kinerja organisasi pada teknologi digital menuntut penanganan kendala pada infrastruktur jaringan yang lebih cepat serta perubahan regulasi menuntut adanya penyesuaian terhadap pengelolaan infrastruktur jaringan.

3) Permasalahan Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Dalam upaya peningkatan pembangunan statistik di Indonesia telah diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dengan Satu Data Indonesia (SDI) diharapkan akan menghasilkan data dan informasi yang berkualitas untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan statistik sektoral yaitu pengelolaan data statistik sektoral yang dilaksanakan oleh perangkat daerah guna menghasilkan data statistik yang berkualitas belum dilaksanakan pengelolaan data statistik sektoral yang sesuai standar. Nilai rata-rata Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Pemalang saat ini adalah 2,59 masih dalam kategori cukup, yaitu proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih

https://jdih.pemalangkab.go.id

menggunakan standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri. Perangkat daerah masih kesulitan dalam mengidentifikasi kegiatan statistik yang dilakukan. Pembinaan dalam hal identifikasi kegiatan statistik bersama dengan BPS Kabupaten Pemalang kepada seluruh perangkat daerah sudah mulai dilakukan pada tahun 2025 tetapi masih perlu dilakukan pembinaan secara intens kepada masing-masing perangkat daerah untuk mengidentifikasi kegiatan statistik.

4) Permasalahan Peningkatan Keamanan Informasi

Dalam era digital yang terus berkembang, tantangan terkait keamanan data dan privasi pengguna menjadi semakin kompleks. Menjaga keamanan data dan melindungi privasi pengguna adalah tugas krusial, dan dihadapkan pada sejumlah tantangan yang memerlukan solusi inovatif. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang mengupayakan dengan mengidentifikasi tantangan dan menerapkan solusi yang tepat, memitigasi risiko terkait keamanan data dan privasi pengguna, menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang adalah risiko keamanan informasi yakni ancaman yang terkait dengan informasi yang disimpan, diolah, dan dipertukarkan oleh sebuah organisasi atau individu. Informasi ini dapat berupa data sensitif seperti informasi keuangan, informasi pribadi, informasi kesehatan, dan informasi rahasia lainnya. Ancaman keamanan informasi ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti *hacker*, virus komputer, kegagalan sistem, kejahatan siber, dan insiden keamanan lainnya. Oleh karena itu, risiko keamanan informasi merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh organisasi dan individu. Permasalahan selanjutnya adalah kesadaran keamanan informasi (IT *security awareness*) yang belum menyeluruh pada aparatur di Pemerintah Kabupaten Pemalang. Kesadaran kemananan informasi adalah kemampuan individu atau organisasi untuk memahami dan mengenali risiko keamanan informasi serta melakukan tindakan untuk mengurangi risiko tersebut. Kesadaran keamanan informasi penting karena dapat membantu organisasi dan individu untuk menghindari serangan siber dan kehilangan data yang sensitif.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang selama lima tahun terakhir, beberapa permasalahan utama dapat diidentifikasi. Permasalahan tersebut menjadi fokus penting dalam meningkatkan kinerja pelayanan organisasi ke depan, yaitu :

Tabel 2. 7.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Keterbukaan Informasi Publik	- Belum seluruh badan publik termasuk dalam kategori informatif. - Layanan informasi publik belum dilaksanakan secara menyeluruh dan efektif. - Respons terhadap aduan masyarakat masih belum optimal karena keterlibatan lintas OPD yang belum konsisten.	- Kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap ketentuan UU No. 14 Tahun 2008. - Kapasitas SDM PPID pembantu belum merata di setiap perangkat daerah. - Belum adanya sistem koordinasi yang efektif antar-OPD dalam penyelesaian aduan publik.
Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	- Belum tersedianya seluruh regulasi pendukung pelaksanaan SPBE. - Belum optimalnya integrasi antar sistem digital di lingkungan pemerintah daerah. - Terdapat duplikasi infrastruktur dan tumpang tindih fungsi sistem informasi. - Standardisasi TIK dan arsitektur SPBE belum terimplementasi secara menyeluruh.	- Keterbatasan regulasi teknis dan pedoman pelaksanaan SPBE. - Rendahnya koordinasi antarperangkat daerah dalam integrasi sistem. - Ketergantungan pada sistem sektoral yang berjalan terpisah. - Keterbatasan kapasitas SDM pengelola TIK dan keamanan siber. - Infrastruktur jaringan belum sepenuhnya diperbarui sesuai kebutuhan teknologi terkini.
Penyelenggaraan Statistik Sektoral	- Penyelenggaraan statistik sektoral belum sepenuhnya memenuhi standar Satu Data Indonesia. - Kualitas data statistik sektoral belum optimal. - Perangkat daerah masih kesulitan mengidentifikasi kegiatan statistik yang dilakukan.	- Pemahaman dan kemampuan teknis perangkat daerah terhadap pedoman statistik sektoral masih terbatas. - Pembinaan dari instansi pembina (BPS) belum dilakukan secara intensif dan menyeluruh. - Belum tersedianya sistem pengelolaan data sektoral yang terintegrasi di seluruh perangkat daerah.
Peningkatan Keamanan Informasi	- Risiko ancaman keamanan informasi yang meningkat seiring perkembangan teknologi digital. - Kesadaran keamanan informasi di kalangan aparatur pemerintah masih rendah. - Belum optimalnya sistem perlindungan terhadap data sensitif dan infrastruktur digital pemerintah daerah.	- Rendahnya tingkat literasi dan kesadaran keamanan siber pada aparatur. - Keterbatasan sumber daya dan anggaran dalam penerapan sistem keamanan informasi. - Belum adanya kebijakan teknis dan standar operasional prosedur keamanan informasi yang komprehensif. - Peningkatan ancaman siber dan serangan digital yang memerlukan mitigasi

https://jdih.pemalangkab.go.id

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		berkelanjutan.

2.2.2. Isu strategis

Isu strategis adalah situasi yang memiliki potensi menjadi tantangan atau peluang bagi suatu daerah di masa mendatang. Dalam konteks Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang, isu-isu strategis berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian. Isu-isu ini mencerminkan aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian khusus untuk meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang serta mendukung pembangunan daerah yang lebih baik. Isu strategis berdasarkan tidak hanya mendasarkan pada hasil analisis data yang menggambarkan permasalahan yang dihadapi, tetapi juga dengan memperhatikan potensi, isu KLHS, global, nasional, regional dan daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2. 8. Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
▪ Infrastruktur digital yang terus membaik dilihat dari akses internet yang sudah menjangkau seluruh wilayah dan adanya jaringan fiber optic, BTS, atau jaringan 4G/5G. Keberadaan pusat data atau server lokal yang terus berkembang	▪ Keterbukaan Informasi Publik ▪ Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ▪ Penyelenggaraan Statistik Sektoral ▪ Peningkatan Keamanan Informasi	▪ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang tidak terlibat secara langsung dalam isu strategis dalam KLHS tetapi mendukung penyelesaian isu strategis tersebut melalui tugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang	▪ Disrupsi Teknologi	▪ IPTEKIN dan Riset Lemah ▪ Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah ▪ Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	▪ Belum optimalnya tata kelola pemerintahan menghadirkan pelayanan publik yang adaptif dan berintegritas. Kondisi ini ditunjukkan dengan kinerja Reformasi Birokrasi, SPBE, Pengawasan dan Pengendalian serta manajemen ASN berbasis Sistem Merit Provinsi Jawa Tengah yang membaik dari tahun-tahun sebelumnya namun dampak terhadap kualitas pelayanan publik dan capaian pembangunan daerah belum meningkat signifikan.	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan data statistik yang didukung keamanan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dapat disimpulkan bahwa isu strategis pembangunan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 adalah **belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan data statistik yang didukung keamanan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**. Kondisi ini menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi informasi yang tersedia belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pemerintahan kepada masyarakat. Selain itu, penggunaan data statistik sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan juga masih perlu ditingkatkan, termasuk aspek keamanan data yang menjadi landasan penting dalam era digital saat ini. Kurangnya optimalisasi ini berpotensi menghambat kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan layanan publik yang transparan, cepat, dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dalam memperkuat sistem teknologi informasi, meningkatkan literasi digital di lingkungan pemerintah, serta memastikan perlindungan data melalui penerapan standar keamanan informasi yang memadai.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB III
TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

3.1.1.Tujuan

Tujuan Renstra Perangkat Daerah adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta memperhatikan sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029, dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Pemalang yaitu “PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA” dengan mendukung misi ke 7 (tujuh) Digitalisasi yaitu : Memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menetapkan tujuan sebagai berikut :

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi

Untuk mengukur keberhasilan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang diatas ditetapkan indikator kinerja Persentase meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi dengan perhitungan sebagai berikut

Tabel 3.1.
Tujuan Dinas Komunikasi dan Informasi 2025-2029

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi	Indeks Pemerintahan Digital (SPBE)	indeks	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7

3.1.2.Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Sasaran yang akan dicapai Dinas

https://jdih.pemalangkab.go.id

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dalam jangka waktu tahun 2025-2029 yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

1	Meningkatnya pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja jangka menengah tahun 2025-2029 pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dapat dirinci pada Tabel 3.2. sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi		Indeks Pemerintahan Digital (SPBE)	Indeks	3,04	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	
		Meningkatnya pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi	Nilai Domain Layanan	Indeks	0	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	
			Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	0	2,59	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20	
			Nilai Domain Tata Kelola	Indeks	0	2,4	3	3,2	3,4	3,6	3,8	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	76	77	78	79	80	81	82	
			Nilai SAKIP	Angka	70,60	71	72	73	74	75	76	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Agenda pembangunan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dibagi dalam lima tahapan pembangunan. Pembagian tahapan ini dimaksudkan agar dalam menyusun target dalam mencapai prioritas pembangunan dapat lebih realistis dan dapat terlihat ukuran capaian setiap periodenya. Selain itu, tahapan disusun agar Dinas Komunikasi dan Informatika dapat menyesuaikan dengan kondisi sumber daya (anggaran, SDM, infrastruktur) yang terbatas, sehingga perlu prioritas bertahap, bukan sekaligus.

Adapun tahapan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika selama periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Penahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030
Penguatan infrastruktur dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah dan pelayanan publik	Pengembangan infrastruktur TIK dalam Peningkatan keamanan data dan Kualitas Pelayanan Publik	Akselerasi Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Digital didukung dengan keamanan data	Integrasi berbagai aplikasi layanan publik untuk meningkatkan keterpaduan, efisiensi, dan transparansi layanan	Penerapan Data statistik sektoral daerah yang aman, terintegrasi dan berbasis teknologi informasi guna mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

Sasaran 1. Meningkatnya pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi.

Strategi dalam mencapai sasaran ini adalah :

a. Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu, dan menjangkau seluruh perangkat daerah untuk mendukung penyelenggaraan layanan publik berbasis digital.
b. Meningkatkan kualitas dan integrasi sistem aplikasi layanan pemerintahan, termasuk penyediaan layanan digital yang mudah diakses, responsif, dan memenuhi standar keamanan informasi.

https://jdih.pemalangkab.go.id

c. Memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui penyelarasan arsitektur SPBE, integrasi layanan, serta penggunaan platform bersama antarperangkat daerah.
d. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penguasaan teknologi informasi melalui pelatihan, pendampingan teknis, sertifikasi kompetensi, serta pembiasaan penggunaan aplikasi pemerintahan digital.
e. Mengembangkan standar operasional prosedur (SOP) layanan digital untuk memastikan layanan pemerintah berbasis TI berjalan efektif, terukur, aman, dan memiliki kualitas yang seragam.
f. Mendorong pemanfaatan dan analisis data digital dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja layanan publik agar lebih cepat, tepat, dan berbasis bukti.
g. Meningkatkan keamanan siber dan keandalan pengelolaan informasi pemerintah melalui penguatan persandian, manajemen risiko keamanan informasi, serta perlindungan data pemerintah dan masyarakat.
h. Mendorong literasi digital masyarakat agar layanan pemerintahan berbasis TI dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pengguna dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah.

Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Strategi dalam mencapai sasaran ini adalah :

a. Menguatkan tata kelola manajemen kinerja perangkat daerah melalui penyusunan perjanjian kinerja yang lebih terukur, pemantauan capaian secara berkala, serta pemanfaatan sistem informasi kinerja terintegrasi.
b. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan layanan dan manajemen kinerja melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, coaching, dan penguatan budaya kerja profesional.
c. Mengembangkan sistem pengelolaan pengaduan dan aspirasi masyarakat yang responsif guna meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkuat mekanisme evaluasi berbasis masukan masyarakat.
d. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan publik dan monitoring kinerja untuk

https://jdih.pemalangkab.go.id

meningkatkan kecepatan layanan, transparansi, serta efisiensi proses kerja.

e. Memperkuat sistem evaluasi internal perangkat daerah melalui audit kinerja, reviu, serta evaluasi mandiri yang dilakukan secara berkala untuk memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi.

3.2.2. Arah Kebijakan

Kebijakan sebagai langkah strategis dalam menentukan arah program yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam beraktivitas. Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung layanan pemerintah yang terintegrasi dan berkelanjutan.
b. Pengembangan dan optimalisasi layanan pemerintahan digital melalui penyediaan aplikasi layanan publik yang terpadu, mudah diakses, dan memenuhi standar keamanan informasi.
c. Penguatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui integrasi layanan, penyelarasan arsitektur SPBE, dan peningkatan interoperabilitas antarperangkat daerah.
d. Peningkatan kapasitas aparatur dalam penguasaan teknologi informasi guna memastikan kualitas pengelolaan layanan digital dan percepatan transformasi digital pemerintahan.
e. Peningkatan tata kelola data dan keamanan informasi melalui penguatan persandian, implementasi manajemen risiko keamanan siber, serta perlindungan data pemerintah dan masyarakat.
f. Peningkatan literasi digital masyarakat untuk mendorong pemanfaatan layanan publik berbasis teknologi informasi secara lebih optimal dan inklusif.
g. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik melalui penyusunan dan penerapan standar pelayanan serta SOP yang memenuhi prinsip transparansi, efektivitas, dan kebutuhan masyarakat.
h. Penguatan tata kelola manajemen kinerja perangkat daerah melalui penerapan sistem perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang terintegrasi dan berorientasi hasil.

https://jdih.pemalangkab.go.id

i. Peningkatan kapasitas aparatur dalam pelayanan publik dan manajemen kinerja melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.
j. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan publik dan pemantauan kinerja untuk mendukung pelayanan yang cepat, transparan, dan efisien.
k. Penguatan sistem pengelolaan pengaduan dan aspirasi masyarakat guna meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat mekanisme evaluasi berbasis partisipasi publik.
l. Peningkatan efektivitas evaluasi internal dan pengawasan kinerja melalui audit kinerja, reviu, monitoring, dan tindak lanjut hasil evaluasi secara konsisten.
m. Peningkatan budaya kerja berintegritas dan akuntabel melalui penerapan sistem penghargaan dan sanksi yang objektif, profesional, dan sesuai ketentuan.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan tujuan, sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4.
Teknik Merumuskan Arah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
1		1. Peningkatan kualitas digitalisasi pelayanan pemerintahan difokuskan pada peningkatan tata kelola arsitektur SPBE, mendorong kualitas SMART City, dan kualitas layanan aduan masyarakat; 2. Peningkatan kualitas satu data difokuskan pada peran produsen data dan penyediaan data sektoral; 3. Peningkatan keamanan informasi daerah; 4. Peningkatan kualitas pelayanan publik difokuskan pada	a. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung layanan pemerintah yang terintegrasi dan berkelanjutan. b. Pengembangan dan optimalisasi layanan pemerintahan digital melalui penyediaan aplikasi layanan publik yang terpadu, mudah diakses, dan memenuhi standar keamanan informasi. c. Penguatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
		pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan kepuasan pada masyarakat;	(SPBE) melalui integrasi layanan, penyelarasan arsitektur SPBE, dan peningkatan interoperabilitas antarperangkat daerah. d. Peningkatan kapasitas aparatur dalam penguasaan teknologi informasi guna memastikan kualitas pengelolaan layanan digital dan percepatan transformasi digital pemerintahan. e. Peningkatan tata kelola data dan keamanan informasi melalui penguatan persandian, implementasi manajemen risiko keamanan siber, serta perlindungan data pemerintah dan masyarakat. f. Peningkatan literasi digital masyarakat untuk mendorong pemanfaatan layanan publik berbasis teknologi informasi secara lebih optimal dan inklusif. g. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik melalui penyusunan dan penerapan standar pelayanan serta SOP yang memenuhi prinsip transparansi, efektivitas, dan kebutuhan masyarakat. h. Penguatan tata kelola manajemen kinerja perangkat daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
			melalui penerapan sistem perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang terintegrasi dan berorientasi hasil. i. Peningkatan kapasitas aparatur dalam pelayanan publik dan manajemen kinerja melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. j. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan publik dan pemantauan kinerja untuk mendukung pelayanan yang cepat, transparan, dan efisien. k. Penguatan sistem pengelolaan pengaduan dan aspirasi masyarakat guna meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat mekanisme evaluasi berbasis partisipasi publik. l. Peningkatan efektivitas evaluasi internal dan pengawasan kinerja melalui audit kinerja, reviu, monitoring, dan tindak lanjut hasil evaluasi secara konsisten. m. Peningkatan budaya kerja berintegritas dan akuntabel melalui penerapan sistem penghargaan dan sanksi yang objektif,	

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
			profesional, dan sesuai ketentuan.	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Program Prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Dokumen RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5. **Program Prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika**

No	Visi/ Frase Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Outcome	Indikator Program
	"PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA"						
		T2 Meningkatnya reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi			
			S2. Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik	Maturitas SPIP	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
							Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berbasis teknologi informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menyusun berbagai program strategis yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan informasi publik, penguatan infrastruktur digital, serta pengamanan data dan komunikasi pemerintah daerah. Program-program tersebut dirancang untuk memperkuat integrasi antar perangkat daerah, mendorong inovasi berbasis teknologi, dan mewujudkan pemanfaatan data yang akurat serta aman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun uraian program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan akan layanan informasi dan komunikasi baik terutama antar perangkat daerah melalui layanan jaringan intra, layanan pengaduan, dan layanan data center. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menetapkan berbagai kegiatan dan subkegiatan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut yaitu:

a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1) Relasi Media
2) Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
3) Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
4) Pelayanan Informasi Publik
5) Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
6) Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
7) Diseminasi Informasi
8) Pengelolaan Media Komunikasi Publik
9) Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
10) Penyusunan Konten

https://jdih.pemalangkab.go.id

11) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik

2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada upaya sinergi dan integrasi aplikasi seperti melalui pemakaian aplikasi berbagi pakai dan bimbingan pengembangan aplikasi yang terpadu untuk mendukung perwujudan *smart city*. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menetapkan berbagai kegiatan dan subkegiatan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut yaitu:

a. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1) Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
3) Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
4) Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
5) Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
6) Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
7) Penyediaan Akses Internet
8) Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
9) Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas

3. Program Pengembangan Statistik Sektoral

Program ini diarahkan pada perwujudan satu data melalui penerapan portal data menuju layanan data terbuka. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menetapkan berbagai kegiatan dan subkegiatan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut yaitu:

a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

https://jdih.pemalangkab.go.id

1) Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional
2) Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
3) Peningkatan Kualitas Statistik Sektora
4) Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
5) Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
6) Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral

4. Program Penyelenggaraan Pesandian untuk Pengamanan Informasi

Program ini diarahkan pada ketangguhan layanan keamanan informasi pemerintah daerah melalui *assessment* aplikasi, digital forensik. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menetapkan berbagai kegiatan dan subkegiatan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut yaitu:

a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
2) Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan
3) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
4) Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan, tata kelola administrasi, serta dukungan sumber daya yang diperlukan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menetapkan berbagai kegiatan dan subkegiatan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut yaitu:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

https://jdih.pemalangkab.go.id

3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7) Fasilitasi Kunjungan Tamu
8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

https://jdih.pemalangkab.go.id

9) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
10) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Pengadaan Alat Besar
4) Pengadaan Mebel
5) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
4) Pemeliharaan Mebel
5) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
8) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.1.
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisiensi, dengan pelayanan publik yang baik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi				Indeks Pemerintahan Digital (SPBE)		
		Meningkatnya pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi			Nilai Domain Layanan		
					Nilai Domain Tata kelola		
					Indeks Pembangunan Statistik		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
					Nilai SAKIP		
			Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota		Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi		
				Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai regulasi	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi	**Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan	dan Fungsi	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi	**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	Penyediaan Barang Cetakan dan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Perundang-undangan	Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penggandaan	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Pengadaan Alat Besar	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa	Jumlah Laporan	Penyediaan Jasa	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
				Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Kab/ kota sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Relasi Media	
				Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
				Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
				Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Pelayanan Informasi Publik	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					komunikasi publik		
				Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
				Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Diseminasi Informasi	
				Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
				Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Penyusunan Konten	
				Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
			Meningkatnya pengelolaan aplikasi informatika		Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
					Persentase Layanan		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		
				Terlaksananya pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	**Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo**	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	
					Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah		
				Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional		
				Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
				Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
				Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Penyediaan Akses Internet	
				Terlaksananya koordinasi penyusunan	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola	Koordinasi penyusunan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
			Meningkatnya penyelenggaraan statistik sektoral		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
					Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		
				Terselengaranya Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai Renstra Kominfo)**	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral		
				Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	
				Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
				Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	Peningkatan Kualitas Statistik Sektora	
				Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
				Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	
				Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Satu Data Daerah			
			Meningkatnya keamanan informasi pemerintah		Tingkat Maturitas Keamanan Informasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
				Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik**	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	
					Persentase sistem elektronik/ aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah		
				Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
				Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
				Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.2.
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Outcome/Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota**	**Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi**	**%**	**100**	**100**	**7.567.596.000**	**100**	**9.272.702.756**	**100**	**9.272.702.756**	**100**	**9.272.702.756**	**100**	**9.272.702.756**
		Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai regulasi**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi**	**Dokumen**	**27**	**29**	**1.288.101.448**	**29**	**1.578.332.384**	**29**	**1.578.332.384**	**29**	**1.578.332.384**	**29**	**1.578.332.384**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	6	161.012.681	6	197.291.548	6	197.291.548	6	197.291.548	6	197.291.548
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	3	161.012.681	3	197.291.548	3	197.291.548	3	197.291.548	3	197.291.548

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Outcome/Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	3	3	161.012.681	3	197.291.548	3	197.291.548	3	197.291.548	3	197.291.548
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	4	161.012.681	4	197.291.548	4	197.291.548	4	197.291.548	4	197.291.548
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4	4	161.012.681	4	197.291.548	4	197.291.548	4	197.291.548	4	197.291.548
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	161.012.681	3	197.291.548	3	197.291.548	3	197.291.548	3	197.291.548
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3	161.012.681	3	197.291.548	3	197.291.548	3	197.291.548	3	197.291.548

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Outcome/Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	3	3	161.012.681	3	197.291.548	3	197.291.548	3	197.291.548	3	197.291.548
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi**	**Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi**	**%**	**100**	**100**	**966.076.086**	**100**	**1.183.749.288**	**100**	**1.183.749.288**	**100**	**1.183.749.288**	**100**	**1.183.749.288**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	12	12	161.012.681	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	161.012.681	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	161.012.681	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	161.012.681	1	197.291.548	1	197.291.548	1	197.291.548	1	197.291.548

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Outcome/Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1	161.012.681	1	197.291.548	1	197.291.548	1	197.291.548	1	197.291.548
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	3	3	161.012.681	3	197.291.548	3	197.291.548	3	197.291.548	3	197.291.548
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi**	**%**	**100**	**100**	**644.050.724**	**100**	**789.166.192**	**100**	**789.166.192**	**100**	**789.166.192**	**100**	**789.166.192**
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	1	161.012.681	1	197.291.548	1	197.291.548	1	197.291.548	1	197.291.548
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dokumen	0	50	161.012.681	50	197.291.548	50	197.291.548	50	197.291.548	50	197.291.548
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	400	600	161.012.681	600	197.291.548	600	197.291.548	600	197.291.548	600	197.291.548

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Outcome/Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	200	200	161.012.681	200	197.291.548	200	197.291.548	200	197.291.548	200	197.291.548
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi**	**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi**	**%**	**100**	**100**	**1.610.126.810**	**100**	**1.972.915.480**	**100**	**1.972.915.480**	**100**	**1.972.915.480**	**100**	**1.972.915.480**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	6	161.012.681	10	197.291.548	10	197.291.548	10	197.291.548	10	197.291.548
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	15	161.012.681	15	197.291.548	15	197.291.548	15	197.291.548	15	197.291.548
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	12	161.012.681	15	197.291.548	15	197.291.548	15	197.291.548	15	197.291.548
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	12	161.012.681	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	20	12	161.012.681	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Outcome/Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	12	161.012.681	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	3	161.012.681	5	197.291.548	5	197.291.548	5	197.291.548	5	197.291.548
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	30	161.012.681	30	197.291.548	30	197.291.548	30	197.291.548	30	197.291.548
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	5	161.012.681	6	197.291.548	6	197.291.548	6	197.291.548	6	197.291.548
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	12	161.012.681	15	197.291.548	15	197.291.548	15	197.291.548	15	197.291.548
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**	**%**	**100**	**100**	**1.127.088.767**	**100**	**1.381.040.836**	**100**	**1.381.040.836**	**100**	**1.381.040.836**	**100**	**1.381.040.836**
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	1	161.012.681	1	197.291.548	1	197.291.548	1	197.291.548	1	197.291.548

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Outcome/Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	1	161.012.681	1	197.291.548	1	197.291.548	1	197.291.548	1	197.291.548
Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	0	2	161.012.681	2	197.291.548	3	197.291.548	3	197.291.548	3	197.291.548
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	3	161.012.681	3	197.291.548	6	197.291.548	6	197.291.548	6	197.291.548
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	8	161.012.681	8	197.291.548	10	197.291.548	10	197.291.548	10	197.291.548
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	2	161.012.681	2	197.291.548	2	197.291.548	2	197.291.548	2	197.291.548
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	161.012.681	1	197.291.548	1	197.291.548	1	197.291.548	1	197.291.548
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**100**	**644.050.724**	**100**	**789.166.192**	**100**	**789.166.192**	**100**	**789.166.192**	**100**	**789.166.192**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5000	12	161.012.681	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Laporan	12	12	161.012.681	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Outcome/Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
		dan Listrik yang Disediakan												
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	10	12	161.012.681	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	161.012.681	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	**%**	**100**	**100**	**1.288.101.441**	**100**	**1.578.332.384**	**100**	**1.578.332.384**	**100**	**1.578.332.384**	**100**	**1.578.332.384**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12	12	161.012.681	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	12	161.012.681	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Outcome/Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	12	12	161.012.681	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548
Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	12	12	161.012.681	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	12	161.012.681	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	12	12	161.012.681	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548	12	197.291.548
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20	40	161.012.674	45	197.291.548	45	197.291.548	45	197.291.548	45	197.291.548
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	1	161.012.681	3	197.291.548	3	197.291.548	3	197.291.548	3	197.291.548
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Outcome/Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik**	**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota**	**%**	**80**	**32**	**583.524.000**	**34**	**1.464.013.200**	**35**	**1.464.013.200**	**36**	**1.464.013.200**	**37**	**1.464.013.200**
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Kab/ kota sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**	**%**	**80**	**80**	**583.524.000**	**83**	**1.464.013.200**	**84**	**1.464.013.200**	**85**	**1.464.013.200**	**86**	**1.464.013.200**
Relasi Media	Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Laporan	40	48	53.047.000	48	133.092.100	48	133.092.100	48	133.092.100	48	133.092.100
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan	Komunitas	5	5	53.047.000	5	133.092.100	5	133.092.100	5	133.092.100	5	133.092.100

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Outcome/Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
		terdaftar di Dinas Kominfo												
Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Laporan	0	1	53.047.000	1	133.092.100	1	133.092.100	1	133.092.100	1	133.092.100
Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	12	12	53.047.000	12	133.092.100	12	133.092.100	12	133.092.100	12	133.092.100
Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	%	100	100	53.047.000	100	133.092.100	100	133.092.100	100	133.092.100	100	133.092.100
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi	Rekomendasi	4	4	53.047.000	4	133.092.100	4	133.092.100	4	133.092.100	4	133.092.100

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Outcome/Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
		prioritas Pemerintah Daerah												
Diseminasi Informasi	Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	%	30	32	53.047.000	34	133.092.100	35	133.092.100	36	133.092.100	37	133.092.100
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	4	4	53.047.000	4	133.092.100	4	133.092.100	4	133.092.100	4	133.092.100
Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Dokumen	0	1	53.047.000	1	133.092.100	1	133.092.100	1	133.092.100	1	133.092.100
Penyusunan Konten	Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	1800	1800	53.047.000	1800	133.092.100	1800	133.092.100	1800	133.092.100	1800	133.092.100
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Orang	200	100	53.054.000	100	133.092.200	100	133.092.200	100	133.092.200	100	133.092.200

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Outcome/Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	**Meningkatnya pengelolaan aplikasi informatika**	**Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika**	**%**	**100**	**100**	**5.289.000.000**	**100**	**4.728.061.685**	**100**	**4.728.061.685**	**100**	**4.728.061.685**	**100**	**4.728.061.685**
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	**%**	**83**	**44**		**51**		**59**		**66**		**73**	
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**	**Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo**	**%**	**100**	**100**	**5.289.000.000**	**100**	**4.728.061.685**	**100**	**4.728.061.685**	**100**	**4.728.061.685**	**100**	**4.728.061.685**
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	
Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Dokumen	1	1	587.666.666	1	525.340.187	1	525.340.187	1	525.340.187	1	525.340.187

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Outcome/Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah	41	41	587.666.666	41	525.340.187	41	525.340.187	41	525.340.187	41	525.340.187
Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	1	1	587.666.666	1	525.340.187	1	525.340.187	1	525.340.187	1	525.340.187
Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Aplikasi	1	1	587.666.666	1	525.340.187	1	525.340.187	1	525.340.187	1	525.340.187
Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	Laporan	1	1	587.666.666	1	525.340.187	1	525.340.187	1	525.340.187	1	525.340.187

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Outcome/Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Laporan	1	1	587.666.666	1	525.340.187	1	525.340.187	1	525.340.187	1	525.340.187
Penyediaan Akses Internet	Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	41	41	588.666.672	41	525.340.189	41	525.340.189	41	525.340.189	41	525.340.189
Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	587.666.666	1	525.340.187	1	525.340.187	1	525.340.187	1	525.340.187
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Dokumen	1	1	586.666.666	1	525.340.187	1	525.340.187	1	525.340.187	1	525.340.187
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK														

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Outcome/Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**Meningkatnya penyelenggaraan statistik sektoral**	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah**	**%**	**100**	**100**	**100.000.000**	**100**	**133.113.700**	**100**	**133.113.700**	**100**	**133.113.700**	**100**	**133.113.700**
		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Terselengaranya Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai Renstra Kominfo)**	**%**	**100**	**100**	**100.000.000**	**100**	**133.113.700**	**100**	**133.113.700**	**100**	**133.113.700**	**100**	**133.113.700**
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	**%**	**1**	**1,25**		**1,5**		**1,75**		**2**		**2,25**	
Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	%	0,75	1,6	30.000.000	2	30.000.000	2,5	30.000.000	3	30.000.000	3,5	30.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Outcome/Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	%	39,27	42	30.000.000	45	30.000.000	48	30.000.000	50	30.000.000	55	30.000.000
Peningkatan Kualitas Statistik Sektora	Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	%	100	100	20.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000
Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	65	70	10.000.000	70	10.000.000	70	10.000.000	70	10.000.000	70	10.000.000
Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	%	100	100	5.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000
Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	Laporan	2	2	5.000.000	2	13.113.700	2	13.113.700	2	13.113.700	2	13.113.700
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN	**Meningkatnya keamanan**	**Tingkat Maturitas Keamanan Informasi**	**%**	**34**	**35**	**50.000.000**	**36**	**353.790.600**	**37**	**353.790.600**	**38**	**353.790.600**	**39**	**353.790.600**

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Outcome/Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**informasi pemerintah**													
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik**	**%**	**100**	**100**	**50.000.000**	**100**	**353.790.600**	**100**	**353.790.600**	**100**	**353.790.600**	**100**	**353.790.600**
		Persentase sistem elektronik/ aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	**%**	**-**	**20**		**25**		**30**		**40**		**50**	
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	4	25.000.000	4	203.790.600	4	203.790.600	4	203.790.600	4	203.790.600
Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Laporan	1	1	5.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Outcome/Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah	1	40	5.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	Dokumen	1	1	15.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.3.
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**Meningkatnya pengelolaan aplikasi informatika**	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** a. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota b. Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE c. Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah d. Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE e. Penyediaan Akses Internet f. Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah g. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	

4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur strategis yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dalam mendukung pembangunan daerah. IKU mencerminkan capaian hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program prioritas yang berkontribusi

https://jdih.pemalangkab.go.id

langsung terhadap visi dan misi kepala daerah.

Penyusunan IKU dilakukan secara terintegrasi dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti RPJMD dan Rencana Pembangunan Nasional. IKU disusun dengan prinsip SMART (*Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*) sehingga dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan program, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi kinerja. Berikut adalah indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks Pemerintahan Digital (SPBE)	Indeks	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7
2.	Nilai Domain Layanan	Indeks	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7
3.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,59	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20
4.	Nilai Domain Tata Kelola	Indeks	2,4	3	3,2	3,4	3,6	3,8
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	77	78	79	80	81	82
6.	Nilai SAKIP	Angka	71	72	73	74	75	76

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran utama yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang selama periode perencanaan. IKK disusun secara terukur, relevan, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang. Berikut adalah indikator kinerja kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	37,00	44,00	51,00	59,00	66,00	73,00
3.	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	30,00	32,00	34,00	35,00	36,00	37,00
4.	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	34,00	35,00	36,00	37,00	38,00	39,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029.

5.1. Kesimpulan Substansial

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang selaras dengan Visi dan Misi Bupati. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini dapat direalisasikan bila ada kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program/kegiatan yang telah direncanakan lima tahun kedepan. Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra ini akan sangat bergantung pada komitmen seluruh ASN, dukungan pimpinan daerah, serta sinergi dengan berbagai pihak terkait.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang wajib berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Pemalang. Diharapkan Renstra ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi akan dilaksanakan secara periodik (triwulanan dan tahunan) untuk memantau capaian kinerja dan mengidentifikasi kendala pelaksanaan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk perumusan kebijakan, penyesuaian strategi, dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan ASN. Laporan capaian kinerja akan disampaikan kepada Bupati dan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pelayanan dasar pembangunan Infrastruktur di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan yang telah digariskan dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 maupun RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045. Dengan demikian pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, merupakan bagian integral dan berkesinambungan antara tahapan dan perencanaan pembangunan yang telah dilakukan dengan kondisi yang diinginkan dan atau akan dicapai dalam skala jangka menengah dan jangka panjang.

DPUTR Kabupaten Pemalang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), menjelaskan bahwa PD dalam hal ini DPUTR Kabupaten Pemalang mempunyai kewajiban untuk menetapkan Renstra PD untuk periode lima tahunan. Dalam penyusunan Renstra selain mengacu pada dokumen RPJPD dan RPJMD Kabupaten Pemalang, juga harus memperhatikan Renstra Provinsi Jawa Tengah dan Kementrian PU.

Penyusunan Renstra DPU TR Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 dan pedoman teknis penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pasal 108 sampai 116 menyatakan bahwa proses penyusunan sampai verifikasi Renstra dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renstra PD;
2. Penyusunan rancangan Renstra PD;

https://jdih.pemalangkab.go.id

3. Penyusunan rancangan akhir Renstra PD; serta
4. Penetapan Renstra PD.

Renstra DPUTR Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan tahunan DPUTR Kabupaten Pemalang dalam jangka waktu lima tahun mendatang, selain itu merupakan tolok ukur penilaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Melalui penyusunan Renstra DPUTR Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat memberi arah dan strategi penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab DPUTR Kabupaten Pemalang selama tahun 2021-2026. Renstra ini selanjutnya dapat dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja OPD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Renstra DPU TR Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 memiliki hubungan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik di tingkat daerah maupun nasional serta dokumen perencanaan lainnya.

Dokumen perencanaan yang akan dianalisis adalah dokumen perencanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) Tahun 2016-2030 dan dokumen perencanaan multi sektoral, antara lain: RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, RPJMD Kabupaten Pemalang 2025-2029, RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045, RTRW Kabupaten Pemalang, RTRW kabupaten/kota sekitar, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program serta dokumen lainnya seperti Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan Target Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) Tahun 2016-2030.

1. RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029
   Penyusunan Renstra DPU TR Kabupaten Pemalang mempedomani dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 terutama terkait isu strategis, visi dan misi bupati, sasaran pokok pembangunan, dan indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMD. Dengan demikian maka perencanaan pembangunan perangkat daerah menjadi bagian integral rencana pembangunan jangka menengah daerah.
2. RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029
   Penyusunan Renstra DPU TR Kabupaten Pemalang memperhatikan dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 terutama terkait permasalahan, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan serta indikator kinerja daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah.
3. RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045
   Penyusunan Renstra DPU TR Kabupaten Pemalang berpedoman pada Perda Nomor 7 Tahun 2024 Tentang RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045, yaitu pada periode pertama RPJPD. RPJMD harus memperhatikan isu strategis,

https://jdih.pemalangkab.go.id

sasaran pokok, dan arah kebijakan pembangunan yang ada di RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045.

4. RTRW Kabupaten Pemalang
   Penyusunan Renstra DPU TR Kabupaten Pemalang memperhatikan dokumen RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038, terutama pemperhatikan tentang struktur ruang, pola ruang dan program penataan ruang agar pembangunan daerah selaras dengan kelestarian lingkungan hidup.
5. Renstra Daerah Sekitar
   Penyusunan Renstra DPU TR juga harus memperhatikan Renstra Daerah sekitar agar tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota, serta keterpaduan struktur dan pola ruang dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
6. Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
   Penyusunan Renstra Kabupaten Pemalang memperhatikan dokumen Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, khususnya terkait dengan kebijakan pembangunan di Kabupaten Pemalang.
7. Rencana Kerja
   Renstra DPU TR Kabupaten Pemalang setelah ditetapkan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja DPU TR Kabupaten Pemalang tahun 2026 sampai tahun 2030 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah.
8. Renstra Kementerian Tahun 2025-2029
   Renstra DPU TR Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 memperhatikan Renstra Kementerian Tahun 2025-2029 sehingga dapat sinkron dengan kebijakan nasional.
9. Dokumen Perencanaan Multi Sektoral
   Penyusunan Renstra DPU TR Kabupaten Pemalang memperhatikan dokumen perencanaan multi sektor yang telah tersusun, antara lain Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), RAD Pangan dan Gizi, RAD Kelitbangan, dan lain sebagainya. RPJMD juga akan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan multi sektor yang penyusunannya dilakukan setelah RPJMD ditetapkan. Selengkapnya hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dikemukakan pada skema sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sumber : Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

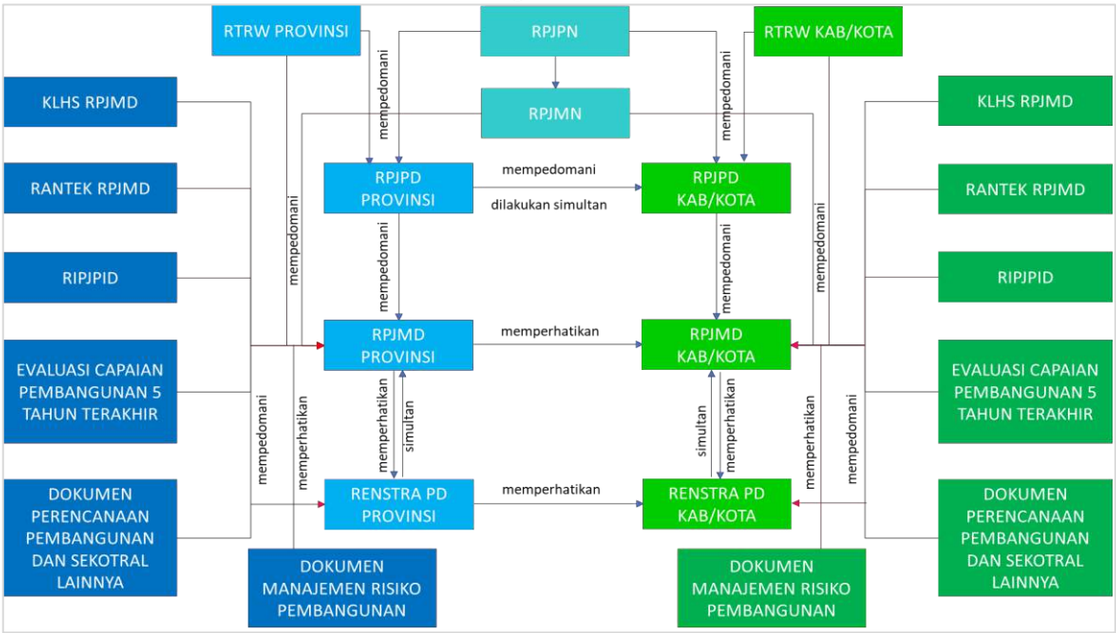

Gambar I.1.
Hubungan Hierarkis Renstra dengan
Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya

I.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Renstra DPUTR Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

https://jdih.pemalangkab.go.id

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161).
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7-98/2025);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2050 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang; (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 13);

https://jdih.pemalangkab.go.id

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 2 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
21. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pengelola Peralatan dan Laboratorium pada DPUTR Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 83);
22. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pemeliharaan Jalan dan Irigasi pada DPUTR Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 80);
23. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

I.3. Maksud dan Tujuan

I.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra DPUTR Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 adalah meningkatkan kinerja penyelenggaraan DPUTR untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

I.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra DPUTR Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 adalah :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh DPUTR Kabupaten Pemalang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Urusan PUPR;
2. Menjadi acuan rencana kerja tahunan 2026 - 2030 dan evaluasi capaian kinerja DPU TR
3. Menjadi acuan kerja bagi DPUTR serta pihak terkait dalam upaya pembangunan urusan PUPR;
4. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja DPUTR Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id

I.4. Sistematika Penulisan

Renstra DPUTR Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi, dan dengan Renja PD.

I.2. Dasar Hukum Penyusunan

Berisi penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

I.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.

I.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

II.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

II.1.1. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;

II.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

II.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

II.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

II.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

II.1.6.Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah

II.1.7. Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

II.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

II.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

II.2.2. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

III.1. Tujuan Renstra DPU TR Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

III.2. Sasaran Renstra DPU TR Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

III.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

III.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

IV.1. Uraian Program Kegiatan dan SubKegiatan beserta Kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

IV.2. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

IV.3. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

IV.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

V.1. Kesimpualan Penting Substansial

V.2. Kaidah Pelaksanaan

V.3. Pelaksanaan Pengendalian Evaluasi

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

II.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

II.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi DPUTR Kabupaten Pemalang

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPUTR Kabupaten Pemalang Kedudukan Perangkat Daerah DPUTR Kabupaten Pemalang mengacu pada:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
2. Peraturan Bupati Pemalang Nomor: 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
3. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pemeliharaan Jalan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang.
4. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pengelola Peralatan Dan Laboratorium Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor: 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, menyatakan bahwa DPU TR merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
DPUTR Kabupaten Pemalang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ruang yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala DPU TR menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga serta jasa kontruksi, cipta karya dan tata ruang;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga serta jasa kontruksi, cipta karya dan tata ruang;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air, bina marga serta jasa kontruksi, cipta karya dan tata ruang;

https://jdih.pemalangkab.go.id

4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas jabatan struktural diatur dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala DPUTR mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
b. merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).
c. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
d. mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
e. mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
f. mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan unsur SPIP.
g. mengarahkan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
h. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
i. merumuskan inovasi daerah urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
j. merumuskan laporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sekretaris DPUTR

Sekretaris DPU TR mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

b. Mengoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
c. Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan.
d. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengelolaan dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kedinasan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggan, barang milik daerah, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dokumentasi dan pengadaan barang/ jasa.
e. Menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian.
f. Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik.
g. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan unsur SPIP.
h. Menyusun konsep inovasi kesekretariatan.
i. Mengoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang-bidang
j. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan.
k. mengoordinasikan penyusunan laporan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA)
Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Sumber Daya Air sesuai dengan dokumen perencanaan.
b. Menyusun rancangan kebijakan Bidang Sumber Daya Air.
c. Merumuskan kebijakan teknis di bidang sumber daya air.
d. Menyelenggarakan perencanaan sumber daya air yang meliputi penyusunan data dan informasi bangunan jaringan irigasi, sungai dan sumber air Jainnya skala daerah; penghimpunan laporan dari masing-masing unit pelaksana teknis dinas, instansi terkait dan lembaga masyarakat mengenai permasalahan jaringan irigasi, sungai dan sumber air lainnya; inventarisasi kerusakan bangunan jaringan irigasi, sungai, abrasi pantai dan muara; serta pengusulan pembangunan, rehabilitasi jaringan irigasi, sungai dan sumber air lainnya.
e. menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air yang meliputi pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, sungai dan sumber air lainnya; pengawasan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, sungai dan sumber air lainnya; serta pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan jaringan

https://jdih.pemalangkab.go.id

irigasi, sungai dan sumber air lainnya kepada lembaga masyarakat terkait.

f. menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan sumber daya air yang meliputi penyusunan Rencana Pola dan Tata Tanam Global (RTTG), Rencana Tata Tanam Detail (RTTD) dan Rencana Pembagian Air (RPA); penyusunan rencana kebutuhan fasilitas dan peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan sumber air Jainnya; kegiatan operasi dan pemeliharaan bangunan irigasi dan pengendalian banjir; perawatan bangunan jaringan irigasi dan pengendali banjir; inventarisasi dan identifikasi kondisi jaringan irigasi, areal irigasi, tanah-tanah sawah pengairan dan potensi air permukaan; rekomendasi teknis untuk izin pemanfaatan maupun pengelolaan sumber daya air; pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan izin pemanfaatan maupun pengelolaan sumber daya air; pengelolaan mutasi tanah irigasi dan tanah pengairan; penghimpunan laporan data hipologi, hidrometri dan pertanaman melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas, Penyuluh Pertanian Lapangan dan masukan masyarakat; serta pembinaan dan penyuluhan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), pengelolaan air jaringan tertier, peraturan perundang-undangan bidang pengairan, pembebasan tanah, irigasi, dan sungai.

g. menyusun konsep inovasi pada Bidang Sumber Daya Air.

h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Sumber Daya Air.

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Sumber Daya Air.

j. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Sumber Daya Air.

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepala Bidang Bina Marga (BM)

a. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Bina Marga sesuai dengan dokumen perencanaan.

b. menyusun rancangan kebijakan Bidang Bina Marga.

c. Merumuskan kebijakan teknis di bidang bina marga.

d. Menyelenggarakan perencanaan teknik dan evaluasi bidang jalan dan jembatan yang meliputi penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan dan jembatan; serta pengembangan teknologi terapan di bidang jalan dan jembatan.

e. Menyelenggarakan pembangunan jalan dan jembatan yang meliputi pengaturan dan pembinaan pembangunan jalan dan jembatan; pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan jalan dan jembatan; serta pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan.

f. menyelenggarakan preservasi jalan dan jembatan yang meliputi pembinaan dan bimbingan teknis pemeliharaan jalan

https://jdih.pemalangkab.go.id

dan jembatan; pemeliharaan jalan dan jembatan; serta pengawasan dan pengendalian pemeliharaan jalan dan jembatan.

g. menyusun konsep inovasi pada Bidang Bina Marga.
h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Bina Marga.
i. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Bina Marga.
j. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Bina Marga.
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Cipta Karya dan Tata Ruang (JAKONCIPKATARU)

Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Jasa Konstruksi, Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai dengan dokumen perencanaan.
b. Menyusun rancangan kebijakan Bidang Jasa Konstruksi, Cipta Karya dan Tata Ruang.
c. Merumuskan kebijakan teknis di bidang jasa konstruksi, cipta karya dan tata ruang.
d. Menyelenggarakan penyehatan lingkungan permukiman dan air minum yang meliputi penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan air minum, air limbah drainase; pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat pengguna sarana prasarana air bersih, air limbah dan drainase; rekomendasi izin penyelenggaraan penetapan standar air limbah dan pengembangan SPAM; penyusunan rencana induk pengembangan SPAM, air limbah dan drainase; kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM, prasarana air limbah dan drainase; pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM; pembangunan dan pemeliharaan prasarana air minum, air limbah dan drainase; pengaturan, pengawasan dan pengendalian pembangunan prasarana pelayanan air minum, air limbah dan drainase; serta fasilitasi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pembangunan prasarana wilayah pelayanan air minum, air limbah dan drainase.
e. Menyelenggarakan jasa konstruksi, penataan bangunan dan bangunan permukiman yang meliputi monitoring data administrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi; sosialisasi peraturan perundang• undangan tentang jasa konstruksi, pelatihan tenaga terampil pada Badan Usaha Jasa Konstruksi; fasilitasi forum jasa konstruksi dengan Badan Usaha Jasa Konstruksi; pengawasan jasa konstruksi; pelayanan bantuan dan bimbingan teknis terhadap pihak-pihak yang melaksanakan pembangunan, menaksir harga bangunan (ruisglah); serta

https://jdih.pemalangkab.go.id

pemberian bantuan teknis berupa saran, rekomendasi, pengesahan desain bangunan dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) pada pembangunan gedung, bangunan permukiman, sarana dan prasarana lingkungan.

f. Menyelenggarakan penataan ruang yang meliputi pemanfaatan investasi kawasan strategis, standar pelayanan minimal Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta kawasan andalan bidang pemetaan ruang sebagai bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK); pembinaan dan memfasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan serta pengelolaan pembangunan; kerjasama dengan dunia usaha/masyarakat dalam pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana; pengaturan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan ruang, kawasan strategis bersama dengan instansi terkait; rekomendasi pemberian izin pemanfaatan ruang dan pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK); fasilitasi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pembangunan tata ruang; pembangunan dan pemeliharaan prasarana wilayah dan kawasan strategis; serta pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pemeliharaan prasarana wilayah dan kawasan strategis.
g. Menyusun konsep inovasi pada Bidang Jasa Konstruksi, Cipta Karya dan Tata Ruang.
h. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Jasa Konstruksi, Cipta Karya dan Tata Ruang.
i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Jasa Konstruksi, Cipta Karya dan Tata Ruang.
j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Jasa Konstruksi, Cipta Karya dan Tata Ruang.
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Selain kedua Peraturan Bupati di atas, susunan organisasi DPUTR juga diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pemeliharaan Jalan dan Irigasi (UPJI) pada DPUTR Kabupaten Pemalang yang terdiri dari:

1. UPJI Wilayah I dengan wilayah kerja Kecamatan Watukumpul;
2. UPJI Wilayah II dengan wilayah kerja Kecamatan Belik;
3. UPJI Wilayah III dengan wilayah kerja Kecamatan Pulosari dan Kecamatan Moga;
4. UPJI Wilayah IV dengan wilayah kerja Kecamatan Randudongkal dan Kecamatan Warungpring;
5. UPJI Wilayah V dengan wilayah kerja Kecamatan Bodeh dan Kecamatan Bantarbolang;
6. UPJI Wilayah VI dengan wilayah kerja Kecamatan Pemalang dan Kecamatan Taman;

https://jdih.pemalangkab.go.id

7. UPJI Wilayah VII dengan wilayah kerja Kecamatan Petarukan dan Kecamatan Ampelgading;
8. UPJI Wilayah VIII dengan wilayah kerja Kecamatan Comal dan Kecamatan Ulujami.

Sedangkan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pengelola Peralatan dan Laboratorium pada DPUTR Kabupaten Pemalang, menyatakan bahwa pada DPUTR dibentuk Unit Pengelola Peralatan dan Laboratorium, yang selanjutnya disingkat UPPL sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah DPU TR.

Struktur Organisasi DPU TR Kabupaten Pemalang

Bersadarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor: 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, susunan organisasi DPU TR Kabupaten Pemalang terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
   a. Subbagian Bina Program dan Keuangan
   b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari:
   Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Bina Marga terdiri dari:
   Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Jasa Konstruksi Cipta Karya dan Tata Ruang terdiri dari:
   Kelompok Jabatan Fungsional
6. UPTD, terdiri dari :
   a. UPJI Wilayah I
   b. UPJI Wilayah II
   c. UPJI Wilayah III
   d. UPJI Wilayah IV
   e. UPJI Wilayah V
   f. UPJI Wilayah VI
   g. UPJI Wilayah VII
   h. UPJI Wilayah VIII
   i. UPPL (Unit Pengelola Peralatan dan Laboratorium)

https://jdih.pemalangkab.go.id

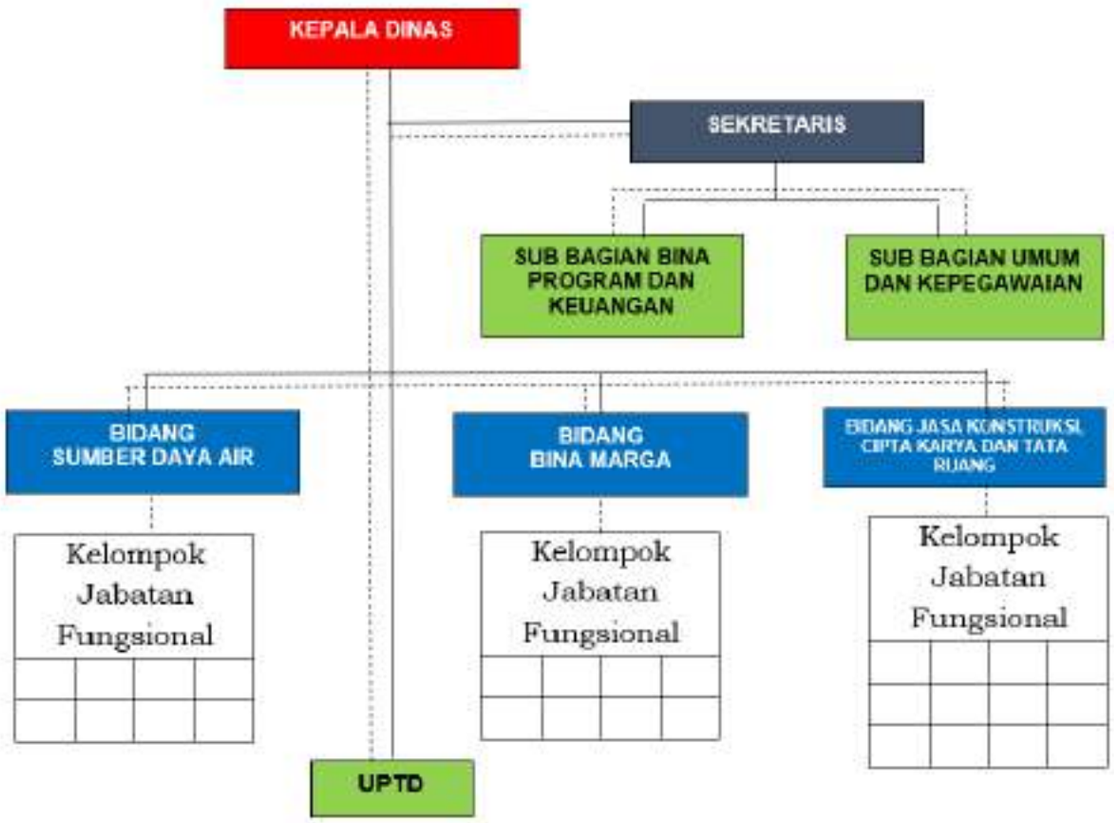

Gambar II.1. Susunan Organisasi
DPUTR Kabupaten Pemalang

II.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

II.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan DPUTR Kabupaten Pemalang mempuyai sumber daya manusia sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) pegawai ASN dan 149 (seratus empat puluh sembilan) pegawai Non ASN. Adapun gambaran potensi pegawai DPU TR adalah sebagai berikut:

a. Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jumlah pegawai yang memiliki jabatan struktural sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebanyak 16 (enam belas) orang, dengan perincian sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel II.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan pada DPUTR Kabupaten Pemalang

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
	1) Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan	1
	2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	1
3	Kepala Bidang Sumberdaya Air	1
4	Kepala Bidang Bina Marga	1
5	Kepala Bidang Jasa Konstruksi Cipta Karya dan Tata Ruang	1
6	UPTD	9
Jumlah		16

Sumber Data : ASN Dalam Angka Kab. Pemalang 2024

b. Pegawai Berdasarkan Eselon

Gambaran pegawai di DPUTR Kabupaten Pemalang berdasarkan eselon adalah sebagai berikut:

Tabel II.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon pada DPUTR Kabupaten Pemalang

No	Eselon	Jumlah (Orang)
1	Eselon IIb	1
2	Eselon IIIa	1
3	Eselon IIIb	3
4	Eselon IVa	2
5	Eselon IVb	9
Jumlah		16

Sumber Data : ASN Dalam Angka Kab. Pemalang 2024

c. Pegawai Berdasarkan Golongan

Jumlah pegawai DPUTR Kabupaten Pemalang berdasarkan golongan pada di DPUTR Kabupaten Pemalang sebagian besar adalah II c yaitu sebanyak 37 pegawai. Jumlah pegawai berdasarkan golongan/pangkat dari 121 pegawai adalah sebagai berikut.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel II.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Pangkat
Pada DPUTR Kabupaten Pemalang

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV-c	0
2	Golongan IV-b	1
3	Golongan IV-a	3
4	Golongan III-d	12
5	Golongan III-c	8
6	Golongan III-b	14
7	Golongan III-a	22
8	Golongan II-d	11
9	Golongan II-c	43
10	Golongan II-b	11
11	Golongan II-a	5
12	Golongan I-d	1
13	Golongan I-c	0
14	Golongan I-b	0
15	Golongan I-a	0
Jumlah		131

Sumber Data : ASN Dalam Angka Kab. Pemalang 2024

d. Pegawai Berdasarkan Kursus yang Pernah Diikuti.

Diklat merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas pegawai dilakukan melalui pengirim pegawai pada berbagai kegiatan kursus maupun pelatihan-pelatihan. Gambaran tentang kegiatan kursus maupun pelatihan yang pernah diikuti oleh pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel II.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kegiatan Kursus/Pelatihan yang Pernah Diikuti di DPUTR Kabupaten Pemalang

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	DIKLAT PIM II	0
2	DIKLATPIM III	2
3	DIKLATPIM IV	6
Jumlah		8

Sumber Data: DPUTR Kab. Pemalang 2024

e. Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan dan Pengelompokan Berdasarkan Jensi Kelamin SDM pada DPUTR Kabupaten Pemalang dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel II.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal pada DPUTR Kabupaten Pemalang

No	Jenjang Pendidikan Formal	Jumlah	
		ASN	Non ASN
1	Sarjana (S2)	9	0
2	Sarjana (S1)	27	35
4	D IV	0	0
5	D III	7	5
6	D I	0	1
6	SLTA	71	90
7	SLTP	14	14
8	SD	3	4
Jumlah		131	149

Sumber Data: DPUTR Kab. Pemalang, 2024

Tabel II.6. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin pada DPUTR Kabupaten Pemalang (ASN dan Non ASN)

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	
		ASN	Non ASN
1	Laki-Laki	116	114
2	Perempuan	15	35
Jumlah		131	149

Sumber Data: ASN Dalam Angka Kab. Pemalang 2024

II.1.2.2 Aset

Fasilitas dan peralatan yang dimiliki oleh DPUTR Kabupaten Pemalang dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel II.7. Fasilitas dan Peralatan pada Kantor DPUTR Kabupaten Pemalang

No.	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah barang	Kondisi				Harga
					Luas	Baik	Kurang baik	Rusak berat	
1	01		Tanah						
		01	Tanah	801	8.006.947	-	-	-	482.169.266.716
			jumlah KIB A	801	8.006.947	-	-	-	482.169.266.716

https://jdih.pemalangkab.go.id

No.	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah barang	Kondisi				Harga
					Luas	Baik	Kurang baik	Rusak berat	
2	02		Peralatan & mesin						
		02	Alat - alat Besar	45					9.405.887.650
		03	Alat - alat Angkutan	141					6.380.317.634
		04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	62					320.394.200
		05	Alat Pertantian	1					4.350.000
		06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.033					4.301.760.240
		07	Alat Studio dan komunikasi	90					534.014.167
		08	Alat - alat Kedokteran	1					9.800.000
		09	Alat Laboratorium	49					377.321.730
		10	Alat - alat Persenjataan / Keamanan	5					41.783.000
			jumlah KIB B	1.429					21.375.628.621
3	03		Gedung & bangunan						
		11	Gedung & bangunan	77	18.211				21.282.732.562
		12	Monumen						
			jumlah KIB C	77	18.211				21.282.732.562
4	04		Jalan, irigasi,& jaringan						
		13	Bangunan Air / Irigasi	90	14.731				9.513.721.194

Sumber Data: DPUTR Kab. Pemalang, 2024

II.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang dapat dilihat dari capaian indikator kinerja dan capaian kinerja anggaran program kegiatan selama kurun waktu lima tahun yang lalu yaitu 2021-2025 yang masing masing dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel II.8. Pencapaian Kinerja Pelayanan DPUTR Kabupaten Pemalang 2021-2025

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1	(2)	(3	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Pekerjaan Umum																		
1.1	Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik sesuai administrasi tata bangunan (%)				1,76	2,56	3,36	4,16	4,96	1,48	1,81	4,04	4,99		84,09	70,70	120,24	119,95	
1.2	Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan (%)				87	88	89	90	91	90,66	88,01	90,05	88,48		104,21	100,01	101,18	98,26	
1.3	Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik (%)				91,70	93	94	95	96	94,61	99,45	95,72	93,99		103,17	106,94	97,61	98,94	
1.4	Persentase sarana dan prasarana persampahan sesuai standar (%)				20	22,5	25	35	45	19,43	20,02	25	25		97,15	88,98	100	71,43	
1.5	Persentase drainase dalam kondisi baik (%)				72	74	76	78	80	75,20	76,06	76,55	76,62		104,44	102,78	100,72	98,23	
1.6	Indeks konektivitas (%)				93,70	94,28	95,77	97,27	98,74	96,80	96,98	97,40	97,42		103,31	102,86	101,33	100,15	
1.7	Persentase panjang jalan kondisi mantap (baik dan sedang) (%)				63,65	66,64	69,53	72,52	75,41	68,28	73	69,43	75,05		107,27	109,54	99,86	103,49	
1.8	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (%)				48	50	52	53	54	52,32	53,06	52,97	51,77		109,00	106,12	101,87	97,68	
1.9	Persentase pemanfaatan tata ruang wilayah sesuai RTRW (%)				100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dari tabel pencapaian kinerja DPUTR tersebut di atas, pada akhir periode Renstra dapat diketahui beberapa hal, antara lain:

1. Indikator kinerja yang melampui target, yaitu:
   a. Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik sesuai administrasi tata bangunan
   b. Indeks Konektivitas
   c. Persentase panjang jalan kondisi mantap (baik dan sedang)
2. Indikator kinerja yang memenuhi target, yaitu:
   a. Persentase pemanfaatan tata ruang wilayah sesuai RTRW
3. Indikator kinerja yang belum memenuhi target, yaitu:
   a. Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan
   b. Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik
   c. Persentase sarana dan prasarana persampahan sesuai standar
   d. Persentase drainase dalam kondisi baik
   e. Indeks Kinerja Sistem Irigasi

Upaya - upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian, antara lain sebagai berikut :

1. Optimalisasi program rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan gedung milik pemerintah.
2. Penyusunan dan pelaksanaan standar teknis pembangunan gedung sesuai administrasi tata bangunan.
3. Pengawasan berkala dan audit teknis bangunan.
4. Peningkatan cakupan jaringan perpipaan PDAM dan pembangunan sambungan rumah baru.
5. Penyediaan sarana air minum berbasis masyarakat di daerah perdesaan.
6. Kerja sama lintas sektor dengan Dinkes dan Bappeda untuk integrasi perencanaan.
7. Pembangunan dan optimalisasi IPAL komunal dan individual.
8. Penyuluhan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah rumah tangga.
9. Kolaborasi dengan desa untuk pengelolaan limbah berbasis masyarakat.
10. Penyediaan TPS, armada angkut, dan fasilitas pemrosesan akhir sesuai standar teknis.
11. Pengembangan TPA berbasis sanitary landfill atau sistem kontrol lainnya.
12. Pelaksanaan program pemeliharaan rutin dan rehabilitasi saluran drainase.
13. Normalisasi dan pengerukan saluran di kawasan rawan genangan.
14. Integrasi data titik banjir dalam perencanaan teknis.
15. Pembangunan dan peningkatan konektivitas antar wilayah melalui jalan penghubung.

https://jdih.pemalangkab.go.id

16. Penyesuaian desain geometrik jalan terhadap kebutuhan distribusi wilayah.
17. Rehabilitasi jalan berdasarkan hasil survei kondisi jalan.
18. Pemeliharaan berkala dan berkualitas pada ruas jalan strategis.
19. Penggunaan material konstruksi yang sesuai standar.
20. Revitalisasi jaringan irigasi tersier dan primer.
21. Peningkatan peran P3A dalam operasi dan pemeliharaan.
22. Implementasi teknologi monitoring debit aliran irigasi.
23. Penegakan regulasi RTRW melalui pengawasan dan izin tata ruang.
24. Digitalisasi dan pemutakhiran peta rencana tata ruang.
25. Sosialisasi dan pelatihan kepada pelaku usaha dan masyarakat.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel II.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPUTR
Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Angg	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	25.590.445.460	22.206.322.000	21.774.372.000	22.233.158.000	24.313.401.403	20.718.428.357	20.893.213.565	19.806.667.741	95,01	93,30	95,95	89,09	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	15.441.695.761	5.377.039.000	8.195.651.000	18.590.066.000	14.854.360.944	4.972.401.396	7.810.723.901	17.672.536.484	96,20	92,47	95,30	95,06	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	14.719.585.900	3.771.201.000	10.764.771.000	13.349.067.000	13.167.924.213	3.636.537.495	9.551.024.366	12.028.156.433	89,46	96,43	88,72	90,10	-	-
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM & PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	700.000.000	1.582.812.000	3.739.772.000	1.752.500.000	664.679.000	1.531.215.400	3.528.835.160	1.441.798.458	94,95	96,74	94,36	82,27		

https://jdih.pemalangkab.go.id

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.375.474.000	4.355.044.000	5.646.529.000	7.082.959.264	6.439.706.220	4.348.261.680	5.516.730.400	6.852.436.382	101,01	99,84	97,70	96,75		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3.559.937.957	820.000.000	1.773.503.000	732.500.000	3.512.889.680	815.149.150	1.741.283.450	712.348.500	98,68	99,41	98,18	97,25		
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	14.800.888.264	7.561.400.000	3.756.000.000	3.771.000.000	14.527.420.989	7.464.153.650	3.613.017.000	3.674.784.727	98,15	98,71	96,19	97,45		
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	167.402.000	578.800.000	304.000.000	353.000.000	162.635.000	577.546.000	303.197.492	350.028.850	97,15	99,78	99,74	99,16		
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	92.276.057.058	121.908.380.000	78.515.883.000	80.326.322.000	85.471.549.903	113.740.418.050	75.063.826.972	79.142.529.393	92,63	93,30	95,60	98,53		
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	198.075.600	125.000.000	111.000.000	100.000.000	178.295.600	124.814.400	106.464.000	97.670.450	90,01	99,85	95,91	97,67		

https://jdih.pemalangkab.go.id

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Angg	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	428.367.000	373.800.000	258.000.000	833.520.000	422.483.530	368.089.217	200.380.010	828.307.605	98,63	98,47	77,67	99,37		

https://jdih.pemalangkab.go.id

Capaian Kinerja Pendapatan Aset Daerah (PAD) DPUTR Kabupaten Pemalang

Salah satu capain kinerja pelayan DPUTR, selain pelayanan dasar berupa jalan, irigasi dan sanitasi, pendapatan daerah juga merubakan indicator capaian kinerja DPUTR. Pendapatan diterima dari sewa Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dan penyewaan alat berat. Kondisi alat berat yang termakan usia, membuat kondisi pendapatan DPUTR dari tahun ke tahun menurun, disamping semakin kompetitifnya persaingan dari penyedia alat berat swasta. Selain itu, sebagai bentuk pelayanan sosial kepada masyarat, alat berat juga dipinjamkan tanpa biaya seperti pada kondisi bencana banjir dan tanah longsong serta pemusnahan miras. Meskipun pemeliharaan telah dilakukan secara berkala, jumlah alat berat dan biaya yang tersedia tidak seimbang, sehingga banyak yang tidak mendapatkan perawatan.

Berikut ini disajikan capaian kinerja pelayanan DPUTR Kabupaten Pemalang berdasarkan target Pendapatan Aset Daerah (PAD), dapat dilihat pada tabel II.11 berikut.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel II.11. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

pada DPUTR Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2024

Uraian	Pendapatan 2021			Pendapatan 2022			Pendapatan 2023			Pendapatan 2024		
	Target Perubahan 2021	Realisasi 2021	%	Target Perubahan 2022	Realisasi 2022	%	Target Perubahan 2023	Realisasi 2023	%	Target Perubahan 2024	Realisasi 2024	%
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	-	-		-	-		-	-		3,600,000,000	5,928,457,500	164.68%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Alat Berat)	150,000,000	72,140,000	48.09%	166,700,000	185,910,000	111.52%	276,000,000	126,515,000	45.84%	280,000,000	78,984,000	28.21%
Retribusi Penyewaan Kekayaan Daerah (Penyewaan Tanah Lapangan Mulyoharjo dan Jatidiri)				6,300,000	6,300,000		30,000,000	13,700,000	45.67%	-	17,969,593	100.00%
	157,000,000	**81,540,000**	**51.94%**	**180,000,000**	**198,010,000**	**110%**	**320,000,000**	**147,315,000**	**46.04%**	**3,880,000,000**	**6,025,411,093**	**155.29%**

https://jdih.pemalangkab.go.id

II.1.4. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029 merupakan pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung menerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Penentuan kelompok sasaran ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan intervensi pembangunan infrastruktur tepat sasaran, berdaya guna, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Adapun kelompok sasaran utama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang meliputi:

1. Masyarakat Umum
   Sebagai penerima manfaat langsung dari infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, drainase, irigasi, dan fasilitas penataan ruang, masyarakat Kabupaten Pemalang merupakan kelompok sasaran utama dari seluruh program dan kegiatan pembangunan infrastruktur.
2. Pemerintah Daerah
   Termasuk perangkat daerah lainnya yang membutuhkan dukungan teknis, data, dan koordinasi pembangunan infrastruktur dalam perencanaan dan pelaksanaan program sektoral.
3. Pelaku Usaha dan Dunia Industri
   Pengusaha, investor, dan pelaku sektor produktif yang memerlukan dukungan infrastruktur untuk kelancaran distribusi barang dan jasa, serta sebagai dasar perencanaan pengembangan kawasan ekonomi.
4. Petani dan Kelompok Tani
   Khususnya yang berada di daerah irigasi, sebagai pengguna manfaat langsung dari sistem jaringan irigasi dan pembangunan infrastruktur pertanian lainnya yang dibangun dan dipelihara oleh Dinas Pekerjaan Umum.
5. Masyarakat di Kawasan Tertentu (Perkotaan, Pedesaan, Rawan Bencana, dll.)
   Pembangunan infrastruktur diarahkan pula untuk menjawab kebutuhan khusus di kawasan tertentu seperti kawasan kumuh, kawasan rawan banjir/longsor, atau kawasan yang memerlukan pengembangan tata ruang berkelanjutan.
6. Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya
   Dalam prinsip pembangunan inklusif, Dinas Pekerjaan Umum juga memperhatikan kebutuhan kelompok rentan dengan memastikan aksesibilitas dan keberlanjutan pembangunan yang ramah bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan merumuskan kelompok sasaran secara jelas, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang dapat menyusun strategi yang lebih tepat guna dan efektif dalam mendukung terwujudnya infrastruktur yang andal, merata, dan berkeadilan pada periode perencanaan tahun 2025–2029.

https://jdih.pemalangkab.go.id

II.1.5. Mitra Perangkat Daerah

Mitra perangkat daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra DPU TR Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, sinergi antar-perangkat daerah menjadi kunci untuk memastikan keterpaduan program, efisiensi sumber daya, serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Perangkat daerah mitra seperti Bappeda, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, hingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah turut berperan dalam perencanaan, penganggaran, pengawasan, serta sinkronisasi kebijakan pembangunan agar sesuai dengan visi daerah dan prioritas nasional.

Lebih lanjut, dukungan mitra perangkat daerah diwujudkan melalui koordinasi teknis, penyediaan data dan informasi, serta kolaborasi dalam pelaksanaan program lintas sektor. Misalnya, dalam pembangunan jalan dan jembatan diperlukan integrasi dengan Dinas Perhubungan terkait aspek keselamatan transportasi, sedangkan pada pengembangan sistem drainase dan pengelolaan air perlu didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dengan adanya kolaborasi yang solid dan berkesinambungan, Renstra DPU TR Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029 dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

II.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja

BUMD di Kabupaten Pemalang memiliki kontribusi strategis dalam mendukung pencapaian target kinerja DPU TR, khususnya pada sektor infrastruktur dasar dan penataan ruang. Perumda Air Minum Tirta Mulya berperan penting dalam penyediaan jaringan air bersih yang sejalan dengan target peningkatan cakupan layanan air minum layak dan berkelanjutan pada kawasan perkotaan maupun perdesaan. Dukungan ini selaras dengan sasaran pembangunan prasarana permukiman yang sehat, tertata, dan mendukung kualitas lingkungan hidup.

Selain itu, Bank Jateng sebagai BUMD jasa keuangan berperan dalam mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema kredit daerah, layanan treasury, maupun fasilitasi pinjaman bagi penyedia jasa konstruksi lokal sehingga mendukung keberlangsungan proyek DPU TR. Perumda Pasar turut mendukung pengembangan kawasan perkotaan dan penataan ruang melalui modernisasi pasar rakyat yang terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur jalan, drainase, dan fasilitas umum. Bahkan, Perumda Farmasi dapat bersinergi dalam mendukung ketersediaan sarana kesehatan lingkungan di kawasan pemukiman yang dibangun atau ditata oleh DPU TR. Dengan dukungan lintas BUMD ini, target kinerja DPU TR Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029, seperti peningkatan kualitas infrastruktur dasar, penguatan konektivitas wilayah, serta penataan ruang yang berkelanjutan, dapat dicapai secara lebih optimal dan berdaya guna bagi masyarakat.

https://jdih.pemalangkab.go.id

II.1.7. Kerjasama Daerah

Kerjasama daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pencapaian sasaran Renstra DPU TR Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029. Melalui kerjasama antar-daerah, DPU TR dapat memperkuat sinergi pembangunan infrastruktur, terutama yang bersifat lintas wilayah seperti jaringan jalan kabupaten yang terhubung dengan jalan provinsi maupun nasional, pengelolaan sumber daya air lintas daerah, serta penataan kawasan perbatasan. Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten/kota sekitar menjadi strategis dalam mewujudkan konektivitas wilayah, integrasi tata ruang, serta peningkatan daya saing daerah.

Selain itu, bentuk kerjasama daerah juga diwujudkan dalam pengelolaan program pembangunan yang membutuhkan dukungan kelembagaan dan sumber daya di luar kewenangan Kabupaten Pemalang. Misalnya, kerjasama dengan kabupaten tetangga dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sungai serta pengendalian banjir lintas batas, atau dengan pemerintah provinsi dalam pengembangan kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru. Dengan terbangunnya kerjasama daerah yang harmonis, Renstra DPU TR Kabupaten Pemalang 2025–2029 dapat dilaksanakan secara lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Pemalang maupun daerah sekitarnya.

No.	Calon Mitra	Objek Kerja Sama	Ruang Lingkup	Manfaat
1	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Pengelolaan Sumber Daya Air Di Wilayah Sungai Pemali Comal	Pengelolaan Sumber Daya Air Di Wilayah Sungai Pemali Comal	pencegahan dan penampungan air saat banjir
	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes			
	Dinas Pekejaan Umum Kabupaten Tegal			
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal			
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan			
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan			
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang			
2	Pemerintah Kabupaten Purbalingga	Pengelolaan Sumber Mata Air Lembeyan	Pengelolaan dan pengawasan	Terpenuhinya kebutuhan air baku di

https://jdih.pemalangkab.go.id

No.	Calon Mitra	Objek Kerja Sama	Ruang Lingkup	Manfaat
	Pemerintah Kabupaten Banyumas		sumber mata air dan jaringannya	Kecamatan Pulosari dan sekitarnya
3	Bank Dunia dan BPPW Jawa Tengah	National Urban Water Supply Project (NUWSP)	Pengelolaan air minum	Terpenuhinya kebutuhan air minum perkotaan
4	Muh Aris Marfa	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data dan lnformasi Geospasial di Kabupaten Pemalang.	a. Penyelenggaraan lnformasi Geospasial Dasar; b. Pembinaan penyelenggaraan lnformasi Geospasial Tematik; c. Pembangunan lnfrastruktur lnformasi Geospasial; d. Peningkatan kepasitas sumber daya manusia dalam bidang informasi geospasial; dan e. Pemanfaatan bersama data, sarana dan prasarana tertentu untuk mendukung kegiatan PARA PIHAK.	Mewujudkan penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial yang efektif, efisien, ekonomis, dan akuntabel bagi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pemalang

II.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

II.2.1 Permasalahan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan gap atau perbedaan antara kinerja daerah atau kondisi masyarakat dengan kondisi ideal. Sedangkan analisis isu strategis merupakan pemahaman terhadap permasalahan pembangunan dan isu-isu yang relevan sebagai acuan penting dalam penyusunan rencana strategis DPUTR Kabupaten Pemalang.

Permasalahan yang dihadapi oleh DPU TR Kabupaten Pemalang terdapat permasalahan pada aspek daya saing, yaitu Kapasitas dan Kualitas infrastruktur yang masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2024 Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 75,05% walaupun meningkat dibandingkan tahun 2023 namun masih perlu untuk terus ditingkatkan. Infrastruktur adalah bidang yang tidak dapat dilepaskan dari pembangunan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur akan memberikan dampak pada kondisi sosial dan ekonomi daerah. Ketersediaan infrastruktur-infrastruktur tersebut dapat membuka serta meningkatkan akses yang

https://jdih.pemalangkab.go.id

diperlukan masyarakat terhadap sumber daya yang tersedia untuk mendorong mobilitas sosial dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan limbah domestic dari 99,45% di tahun 2022 menjadi 95,72 % pada tahun 2023. Indeks kinerja sistem irigasi pada tahun 2022 sebesar 53,06 % dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi hanya 52,97. Cakupan akses air minum yang layak pada Tahun 2023 sebesar 90,05% meningkat dibanding tahun 2022 sebesar 88,01%.

II.2.2 Isu Strategis

Isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dirumuskan berdasarkan potensi daerah, permasalahan yang dihadapi, analisis lingkungan hidup strategis (KLHS), serta dinamika lingkungan global, nasional, dan regional yang relevan dengan tugas dan kewenangan Dinas. Salah satu isu penting adalah penguatan pengelolaan infrastruktur sumber daya air, terutama jaringan irigasi, untuk mendukung ketahanan pangan dan menghadapi dampak perubahan iklim seperti perubahan pola hujan. Selain itu, peningkatan konektivitas wilayah menjadi prioritas melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan, sejalan dengan target nasional pengurangan emisi transportasi. Dinas juga dihadapkan pada isu keterbatasan akses air bersih dan sanitasi, sehingga perlu upaya peningkatan layanan dasar tersebut guna mendukung kesehatan masyarakat serta pengendalian pencemaran lingkungan.

Selain itu, isu strategis lainnya adalah penguatan penataan ruang untuk mengendalikan pemanfaatan lahan dan mitigasi kawasan rawan bencana, sebagai respon terhadap urbanisasi yang terus berkembang. Dinas juga perlu memperkuat sistem pengelolaan air limbah domestik secara terintegrasi untuk mendukung lingkungan sehat, selaras dengan target nasional pengurangan pencemaran air. Di bidang jasa konstruksi, perlu ditingkatkan kualitas SDM dan kepatuhan terhadap standar teknis, guna mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. Sementara itu, pengembangan tata bangunan dan lingkungan permukiman menjadi perhatian utama untuk menata kawasan agar layak huni, menanggulangi permukiman kumuh, dan mendukung kebutuhan regional akan permukiman yang tertib dan sehat. Seluruh isu strategis ini menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan program prioritas Dinas PUPR dalam rangka penyusunan Renstra 2025-2029 agar selaras dengan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel II.12 Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi sumber daya air dan jaringan irigasi di wilayah kewenangan kabupaten	Kerusakan jaringan irigasi yang berdampak pada produktivitas pertanian	Perlindungan sumber daya air dan konservasi lahan	Perubahan iklim berdampak pada pola hujan			Penguatan pengelolaan infrastruktur sumber daya air untuk ketahanan pangan dan ketahanan bencana
Potensi jaringan jalan kabupaten sebagai penghubung antar wilayah	Kualitas jalan dan jembatan yang belum merata di seluruh wilayah	Pengurangan emisi dari sektor transportasi		Target konektivitas dan pengurangan emisi transportasi		Peningkatan konektivitas wilayah melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jalan yang berwawasan lingkungan
Potensi pengembangan infrastruktur sanitasi dan air bersih	Masih terdapat daerah yang belum terlayani air bersih dan sistem sanitasi yang layak	Pengendalian pencemaran air dan sanitasi lingkungan			Kebutuhan pelayanan dasar yang merata	Peningkatan akses air bersih dan infrastruktur sanitasi untuk mendukung derajat kesehatan masyarakat

https://jdih.pemalangkab.go.id

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi penataan ruang untuk mendukung pengendalian pemanfaatan ruang	Masih terjadi ketidakteraturan pemanfaatan ruang dan kawasan rawan bencana	Mitigasi bencana dan penataan ruang berkelanjutan	Urbanisasi dan tekanan ruang perkotaan			Penguatan penataan ruang untuk pengendalian pemanfaatan lahan dan mitigasi kawasan rawan bencana
Potensi sistem pengelolaan air limbah terpusat dan kawasan	Belum optimalnya sistem pengelolaan air limbah domestik yang terintegrasi	Pengurangan pencemaran air dan kesehatan lingkungan		Target pengurangan pencemaran air		Peningkatan sistem pengelolaan air limbah domestik yang terintegrasi untuk mendukung lingkungan sehat
Potensi jasa konstruksi daerah yang mendukung pembangunan infrastruktur	Masih rendahnya kualitas SDM jasa konstruksi dan kepatuhan terhadap standar teknis	Pembangunan infrastruktur berkelanjutan		Transformasi industri konstruksi nasional		Penguatan kapasitas dan tata kelola jasa konstruksi daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur berkualitas

https://jdih.pemalangkab.go.id

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi pengembangan tata bangunan dan lingkungan permukiman	Masih ada kawasan permukiman kumuh dan bangunan yang tidak sesuai standar tata bangunan	Pengembangan kawasan layak huni dan berkelanjutan			Kebutuhan permukiman layak dan tertata	Peningkatan pengawasan dan penataan tata bangunan untuk mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dalam Renstra Dinas disusun untuk mencapai sasaran RPJMD dengan tetap memperhatikan pedoman NSPK, sedangkan sasaran Dinas diturunkan secara bertahap (cascading) dari tujuan yang telah ditetapkan agar menghasilkan capaian yang terukur berupa outcome. Arah kebijakan dan strategi Dinas harus selaras dengan NSPK dan arah kebijakan RPJMD, dengan strategi yang dirancang mempertimbangkan tahapan implementasi, fokus prioritas, dan program atau kegiatan konkret sesuai tugas perangkat daerah. Setiap program atau kegiatan menjadi rangkaian kerja nyata yang merupakan implementasi dari strategi dan arah kebijakan Dinas, dengan output kegiatan yang diukur dan dikaitkan dengan pencapaian sasaran serta outcome. Outcome mencerminkan dampak atau hasil akhir yang diharapkan, sedangkan output adalah hasil langsung dari pelaksanaan program atau kegiatan. Keduanya menjadi tolok ukur akuntabilitas kinerja Dinas. Inti dari konsep ini adalah menggambarkan keterhubungan antara dokumen perencanaan daerah, NSPK, isu strategis, hingga implementasi program dan kegiatan secara terintegrasi, sebagai wujud kontribusi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang dalam mendukung pembangunan daerah.

Konsep Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 menunjukkan keterkaitan antara berbagai elemen dalam perencanaan strategis yang disusun secara sistematis dan terpadu. Seluruh proses penyusunan Renstra ini mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah, dengan memperhatikan sasaran RPJMD sebagai acuan utama dalam penetapan tujuan Dinas. Selain itu, NSPK atau Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria menjadi pedoman normatif yang wajib diperhatikan, sehingga arah kebijakan dan pelaksanaan program Dinas tetap sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang berlaku. Arah kebijakan RPJMD sendiri merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas daerah, yang menjadi pedoman utama dalam penyusunan arah kebijakan Renstra Dinas. Seluruh proses ini juga didukung dengan identifikasi isu strategis, baik yang berasal dari permasalahan aktual, dinamika kebijakan nasional maupun regional, serta potensi sumber daya yang dapat dioptimalkan, sebagai dasar perumusan strategi dan prioritas program Dinas.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Gambar 3.1
Konsep Renstra Perangkat Daerah

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah

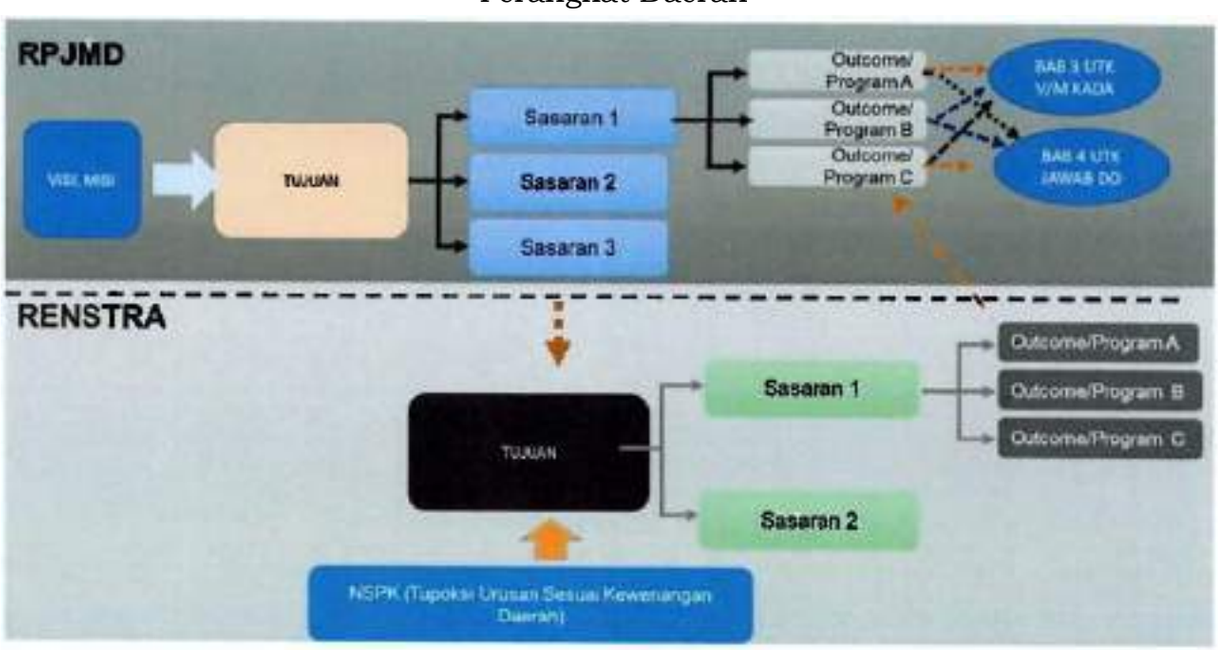

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang periode tahun 2025 – 2029 yaitu "**PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA**". Dari visi tersebut diterjemahkan kedalam misi yaitu **Resik - Hijau - Apik – Peduli – Silaturahmi – Organisatoris – Digitalisasi – Ikhlas.** Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi membantu tugas Bupati dalam hal penyelenggaraan infrastruktur memiliki keterkaitan dengan Misi **Apik** yaitu menciptakan penataan wilayah dengan infrastruktur yang baik dan membangun Pemalang dari desa sampai kota.

Berdasarkan Visi Misi dan fokus kerja, Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang masuk kedalam logframe pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 **Pemalang Cakap** dengan tujuan yang ke - 3 (tiga) yaitu Meningkatkan daya saing pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan dan sasaran yang ke -3 (tiga) yaitu **Meningkatnya daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal.**

Berdasarkan hal tersebut diatas maka tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang terkait dengan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang berdasarkan fungsi utama DPUTR yaitu **Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas.**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang merupakan hasil penyelenggaraan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menuju tercapainya tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang.

Pernyataan Tujuan dan Sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut ini :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel III.1 Tujuan dan Sasaran Renstra DPU TR Kabupaten Pemalang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
S3. Meningkatnya daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	72	73	74	75	76	77	
		Meningkatnya kualitas Infrastruktur urusan pekerjaan umum	Persentase penyelenggaraan infrastruktur urusan pekerjaan umum	60,54	62,54	64,69	66,94	69,30	71,68	Rata-rata capaian indikator program urusan pekerjaan umum
		Meningkatnya pembangunan yang sesuai tata ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	65	67,5	70	72,50	75	77,5	Jumlah permohonan yang sesuai tata ruang dibagi Jumlah permohonan dikali 100 %
		Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	84	85	86	87	88	Nilai IKM yang diperoleh
			Nilai SAKIP OPD	70,10	70,50	70,76	72,36	73,96	75,56	Nilai SAKIP yang diperoleh

https://jdih.pemalangkab.go.id

III.2. Strategi dan Kebijakan DPUTR Kabupaten Pemalang

Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD adalah strategi dan kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah PD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Dalam penyusunan dokumen perencanaan, perumusan strategi dan tujuan merupakan tahapan yang penting karena menunjukkan bagaimana cara PD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah PD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD.

Strategi pembangunan jangka menengah untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

- **Sasaran 1 Meningkatnya kualitas infrastruktur urusan pekerjaan umum**

  Pencapaian sasaran ini diarahkan melalui strategi pada 9 (sembilan) aspek yaitu:

  1. **Persentase jaringan sumber daya air dalam kondisi baik**

     Strategi yang ditempuh adalah melakukan pemeliharaan rutin, rehabilitasi, dan perbaikan jaringan sumber daya air yang rusak agar tetap berfungsi optimal. Upaya ini didukung dengan penerapan sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi untuk mendeteksi potensi kerusakan sejak dini, serta penerapan pengelolaan terpadu dengan memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan.
  2. **Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota**

     Strategi yang dilakukan adalah memperluas jangkauan jaringan SPAM melalui pembangunan unit baru maupun optimalisasi unit yang ada, serta meningkatkan kapasitas produksi air minum. Selain itu, pemberdayaan kelembagaan pengelola air minum di tingkat daerah menjadi penting agar layanan dapat terjaga secara berkesinambungan, dengan tetap mengutamakan kualitas dan keterjangkauan layanan bagi masyarakat.
  3. **Persentase terbangunnya sarana prasarana persampahan sesuai standar**

     Strategi diarahkan pada pembangunan dan peningkatan fasilitas pengelolaan persampahan sesuai standar teknis, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, hingga tempat pemrosesan akhir (TPA). Pendekatan reduce, reuse, recycle (3R) juga didorong melalui edukasi dan partisipasi masyarakat agar volume sampah yang masuk ke TPA dapat ditekan.
  4. **Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik**

     Strategi difokuskan pada pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik baik skala kawasan maupun individu, pengembangan infrastruktur instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta penerapan regulasi dan insentif yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah rumah tangga secara berkelanjutan.
  5. **Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik**

     Strategi dilaksanakan melalui normalisasi saluran drainase, pemeliharaan rutin, dan rehabilitasi jaringan yang mengalami kerusakan. Di samping itu,

https://jdih.pemalangkab.go.id

pengendalian banjir dilakukan secara terpadu melalui penerapan tata ruang yang sesuai, konservasi daerah resapan air, dan integrasi dengan sistem pengendalian banjir perkotaan.

6. **Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik**
   Strategi ditempuh dengan melaksanakan pemeliharaan berkala dan rehabilitasi bangunan sesuai dengan standar teknis bangunan gedung negara. Konsep bangunan hijau dan efisiensi energi juga diterapkan untuk mendukung keberlanjutan, kesehatan, dan keselamatan pengguna bangunan, sekaligus menekan biaya operasional jangka panjang.
7. **Persentase penataan bangunan dan lingkungannya**
   Strategi difokuskan pada penguatan regulasi tata ruang, pengawasan pelaksanaan pembangunan gedung, serta penataan lingkungan permukiman agar tertib, sehat, dan aman. Upaya ini didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan yang sesuai standar, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungannya.
8. **Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten/kota**
   Strategi dilakukan dengan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan jalan, pelaksanaan pemeliharaan berkala maupun peningkatan kapasitas jalan sesuai kebutuhan mobilitas masyarakat. Penerapan teknologi konstruksi jalan yang tahan lama dan efisien juga menjadi prioritas agar kualitas jalan mantap dapat terjaga dalam jangka panjang.
9. **Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi**
   Strategi ditempuh melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum, khususnya operator, teknisi, dan analis. Pemerintah daerah memfasilitasi pendidikan, pelatihan, serta sertifikasi kompetensi bekerja sama dengan lembaga resmi. Dengan demikian, kualitas dan profesionalisme SDM dapat meningkat sehingga mendukung tercapainya kualitas infrastruktur yang lebih baik.

- **Sasaran 2 Meningkatnya pembangunan yang sesuai tata ruang**

Strategi pencapaian sasaran ini ditempuh dengan memperkuat regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum terkait pemanfaatan ruang agar setiap pembangunan sesuai dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Upaya dilakukan melalui peningkatan kualitas perencanaan dan sinkronisasi program pembangunan dengan RTRW, pengendalian pemanfaatan ruang melalui mekanisme perizinan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala. Selain itu, dilakukan peningkatan koordinasi lintas sektor serta pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemanfaatan ruang. Pemanfaatan teknologi informasi (seperti sistem informasi geospasial) juga dioptimalkan untuk mendukung keterbukaan data, mempercepat proses pengendalian, serta meningkatkan akuntabilitas. Dengan strategi tersebut, diharapkan tingkat ketaatan pembangunan terhadap RTRW dapat meningkat secara signifikan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

➢ **Sasaran 3 Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah**

Strategi pencapaian sasaran ini ditempuh dengan cara :

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
   - Menyusun dan menerapkan *Standard Operating Procedure (SOP)* pelayanan yang jelas, sederhana, dan mudah diakses masyarakat.
   - Memanfaatkan teknologi digital (*e-government*, aplikasi layanan online, kanal pengaduan) untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan.
   - Melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara berkala, kemudian menindaklanjuti hasilnya sebagai dasar perbaikan layanan.

b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
   - Menyusun perencanaan kinerja yang terukur, selaras dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
   - Melakukan pengendalian dan monitoring secara rutin terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
   - Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) agar sesuai standar SAKIP.
   - Mendorong budaya kerja berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) bukan hanya serapan anggaran.

c. Peningkatan Kapasitas dan Integritas Aparatur
   - Mengembangkan kompetensi ASN melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan coaching yang berorientasi pada pelayanan publik dan manajemen kinerja.
   - Menanamkan nilai integritas, transparansi, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas.

d. Transparansi, Partisipasi, dan Pengawasan Publik
   - Membuka akses informasi layanan, program, dan capaian kinerja secara transparan melalui media resmi.
   - Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, pengaduan, dan evaluasi kinerja pelayanan.
   - Memperkuat fungsi inspektorat dan mekanisme pengawasan internal untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan pencapaian kinerja.

Dari strategi tersebut selanjutnya dilakukan penahapan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Penahapan pembangunan ini sangat penting karena memungkinkan pengelolaan sumber daya dan waktu secara efisien, mendukung koordinasi antar sektor, dan memastikan pencapaian tujuan pembangunan secara berkelanjutan. Penahapan juga memfasilitasi evaluasi dan penyesuaian rencana pembangunan bidang perhubungan secara berkala, sehingga lebih fleksibel terhadap perubahan kondisi internal maupun eksternal. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Penahapan Renstra Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dapat disajikan seperti tabel di bawah ini.

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka mempercepat distribusi barang dan jasa.	Pengembangan infrastruktur dalam pengembangan potensi perekonomian daerah. Penguatan daya saing SDM dalam mendorong daya saing ekonomi. Penguatan industri hijau dan ekonomi sirkuler. Prioritas pengelolaan sampah dan limbah industri.	Peningkatan kualitas pembangunan perkotaan, penataan wilayah perkotaan, membangun area publik yang mendorong aktivitas masyarakat dan ekonomi masyarakat.	Semakin meluas jalan mantap, sumberdaya alam yang mampu mendorong ketahanan air dan pangan, semakin meluas kepemilikan rumah layak huni dan berkurangnya Kawasan Kumuh dan Pemantapan Pemalang Resik yaitu lingkungan yang bersih dengan sampah yang telah terolah.	Perwujudan daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, destinasi wisata yang berdaya saing. Pemantapan ketersediaan pangan berbasis potensi lokal, pemantapan pertumbuhan kawasan perekonomian baru, pemantapan daya dukung energi, air dan pangan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi DPU TR dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang.

Tabel III.3 Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NPSK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya air dengan fokus pemeliharaan saluran irigasi dalam kondisi baik.	Peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya air dengan fokus pemeliharaan saluran irigasi dalam kondisi baik.	1. Keikutsertaan Diklat teknis pada Balai Diklat PUPR Wilayah V Yogyakarta 2. Pemasangan Alat Pengukur otomatis dan Pembuatan aplikasi pemantau real time data hidrologi dan meteorologi 3. Merencanakan Program / kegiatan berdasarkan survei kinerja jaringan Sumber daya Air dalam satu DAS / catchment 4. Meningkatkan Kinerja Organisasi P3A dan memberdayaka n masyarakat pemanfaat Sumber Daya Air dalam pengelolaannya	
2	Peningkatan konektivitas melalui peningkatan kemantapan jalan dan kualitas angkutan yang menghubungkan antarwilayah;	Peningkatan konektivitas melalui peningkatan kemantapan jalan dan kualitas angkutan yang menghubungkan antarwilayah;	Melaksanakan kegiatan pembangunan jalan pada ruas ruas jalan yang belum terkoneksi dan Melaksanakan kegiatan peningkatan/rek onstruksi, pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin jalan sesuai daftar skala prioritas	
3	Peningkatan capaian SPM sanitasi difokuskan pada pengembangan sanitasi aman, penyediaan kualitas IPLT;	Peningkatan pencapaian SPM sanitasi difokuskan pada pengembangan sanitasi aman, penyediaan kualitas IPLT;	Melaksanakan kegiatan sarana prasarana air limbah domestik terpusat sejumlah 500 SR (± 2.500 jiwa) per tahun - Pembangunan dan Rehabilitasi sarana prasarana persampahan (TPS/TPST/TPS 3R/IPLT) sejumlah 5 unit per tahun - Pembangunan dan Rehabilitasi drainase perkotaan sepanjang 7.550 meter pertahun	
4	Peningkatan capaian rumah tangga yang memiliki akses air minum difokuskan pada	Peningkatan pencapaian rumah tangga yang memiliki akses air minum difokuskan pada	Melaksanakan kegiatan peningkatan dan perluasan sarana dan prasarana air minum	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	OPERASIONALISASI NPSK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	pemenuhan air minum layak dan mendorong perkotaan untuk penyediaan air minum perpipaan yang aman;	pemenuhan air minum layak dan mendorong perkotaan untuk penyediaan air minum perpipaan yang aman;		
5	Peningkatan pengawasan bangunan gedung dan lingkungan dengan fokus pendataan secara berkelanjutan dan menyeluruh;	Peningkatan pengawasan bangunan gedung dan lingkungan dengan fokus pendataan secara berkelanjutan dan menyeluruh;	Optimalisasi Pengawasan Pembangunan Gedung melalui Rekomendasi PBG dan SLF	
6	Peningkatan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui optimalisasi pemanfaatan TPST;	Peningkatan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui optimalisasi pemanfaatan TPST;	Peningkatan kondisi sarana prasarana Persampahan (TPST/TPA)	
7	Evaluasi RTRW dan penyusunan RDTR	Evaluasi RTRW dan penyusunan RDTR	Pelaksanaan kegiatan penataan ruang sesuai ketentuan perundangundangan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

IV.1. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang telah menyusun rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025-2029. Sementara itu program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu pijakan penyusunan Renja DPU TR tahun 2030.

Rencana program, kegiatan dan subkegiatan dalam Renstra DPU TR Kabupaten Pemalang merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Pemalang yang diambil dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan pencapaian tujuan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilaksanakan oleh DPU TR Kabupaten Pemalang.

Program yang ditetapkan merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

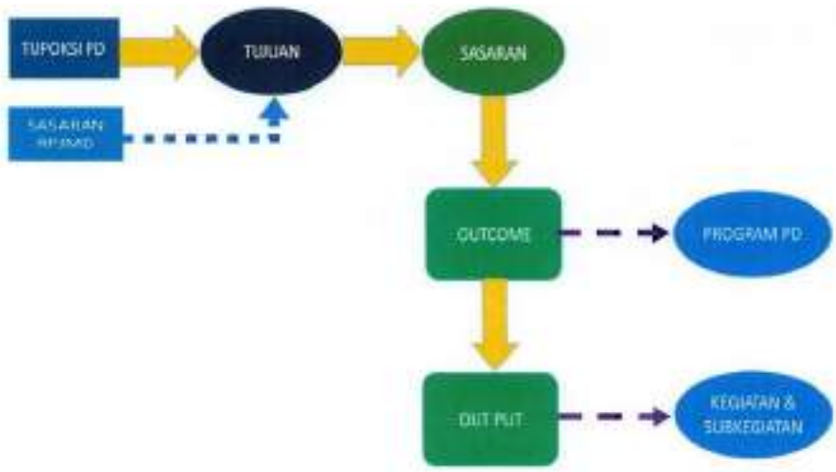

Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD disajikan dalam tabel berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
- Meningkatnya daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas				Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks)		
		Meningkatnya kualitas infrastruktur urusan pekerjaan umum			Persentase penyelenggaraan infrastruktur urusan pekerjaan umum (%)		
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya air		Persentase jaringan sumber daya air dalam kondisi baik (%)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
					Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (%)		
					Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota (%)		
					Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)		
					Indeks kinerja sistem irigasi (IKSI) kewenangan Kabupaten/Kota (Angka)		
				Terkelolanya sungai dan bangunan pengaman pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang sungai dan bangunan pengaman pantai yang dikelola pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1.03.02.2.01.0073 - Operasi dan Pemeliharaan Sungai	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai	
					Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi (KM)	1.03.02.2.01.0105 - Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	
					Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	1.03.02.2.01.0120 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	
				Terkelolanya Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan dan dikelola	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terkelolanya Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
					Jumlah rekomendasi kebijakan alokasi air yang disiapkan, dilaksanakan dan diawasi (Dokumen)	1.03.02.2.02.0045 - Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air	
					Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	1.03.02.2.02.0050 - Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan ((%))	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
				Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum (SR)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Orang)	1.03.03.2.01.0024 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
					Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			Meningkatnya layanan persampahan regional		Persentase terbangunnya sarana prasarana persampahan sesuai standar (%)	1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
				Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarpras persampahan sesuai standar yang dibangun dan direhabilitasi	1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit)	1.03.04.2.01.0009 - Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	1.03.04.2.01.0012 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	
					Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan (Ton/hari)	1.03.04.2.01.0013 - Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	1.03.04.2.01.0015 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	
					Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi (Unit)	1.03.04.2.01.0016 - Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
					Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan (Unit)	1.03.04.2.01.0017 - Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
					Jumlah Masyarakat yang diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (Orang)	1.03.04.2.01.0018 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	
					Jumlah pengelola/operator yang dibina dan diawasi dalam pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS (Pengelola)	1.03.04.2.01.0019 - Pembinaan dan Pengawasan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
					Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)	1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	
					Jumlah unit Sistem Pengelolaan Persampahan di Desa yang terbina (Unit)	1.03.04.2.01.0021 - Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Desa	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
					Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (MÂ³/Hari)	1.03.05.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
					Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan (MÂ³/Hari)	1.03.05.2.01.0027 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	
					Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (MÂ³/Hari)	1.03.05.2.01.0036 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
					Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Orang)	1.03.05.2.01.0040 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
					Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan		Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik (%)	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
				Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang dibangun dan direhabilitasi	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01.0024 - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01.0028 - Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung		Rasio Kepatuhan PBG (%)	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
					Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik (%)	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
				Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Jumlah dokumen rekomendasi penyelenggaraan penerbitan SLF	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
					Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	1.03.08.2.01.0018 - Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)	1.03.08.2.01.0019 - Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	
					Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata		Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya (%)	1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
				Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan yang dibangun/ditata	1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.09.2.01.0010 - Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman		Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota (%)	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan Kabupaten yang ditangani	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
					Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan	
					Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan	
					Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (KM)	1.03.10.2.01.0068 - Pelebaran Jalan Menuju Standar	
					Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan	
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
				Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	1.03.11.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
					Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	1.03.11.2.01.0011 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	
				Terlaksananya penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.03.11.2.02.0014 - Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	
					Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)	1.03.11.2.02.0015 - Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)	1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
					Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	1.03.11.2.04.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)	1.03.11.2.04.0006 - Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	
					Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)	1.03.11.2.04.0007 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.11.2.04.0010 - Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya pembangunan yang sesuai tata ruang			Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang		Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah (Persentase)	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
				Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	jumlah dokumen penetapan RTRW (dokumen)	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01.0003 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	
					Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01.0005 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi)	1.03.12.2.01.0007 - Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	
					dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi (Dokumen)	1.03.12.2.01.0008 - Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota	
					dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi (Dokumen)	1.03.12.2.01.0009 - Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01.0011 - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)	1.03.12.2.01.0013 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi penyusunan RDTR dan RTRW kabupaten / kota yang dilaksanakan (kegiatan)	1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)	1.03.12.2.02.0006 - Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	
					Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Kegiatan)	1.03.12.2.02.0008 - Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi dan simkronisasi pemanfaatan ruang Daerah kabupaten /Kota yang dilaksanakan	1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen)	1.03.12.2.03.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	1.03.12.2.03.0004 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	
					Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	
					Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)	1.03.12.2.03.0007 - Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi dan simkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang Daerah kabupaten /Kota yang dilaksanakan	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
					Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang (Kasus)	1.03.12.2.04.0006 - Pelaksanaan Audit Tata Ruang	
		Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Angka)		
					Nilai SAKIP OPD (Angka)		
			Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota		Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi (%)	1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi (%)		
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai regulasi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai regulasi	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1.03.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi	Persentase Dokumen Keuangan disusun sesuai regulasi	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.03.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.03.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.03.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.03.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Fasilitasi Administratif umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi	Persentase Fasilitasi Administrasi umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan sesuai regulasi	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Millik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1.03.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

https://jdih.pemalangkab.go.id

TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**123.204.572.900,00**		**213.521.674.814,00**		**214.489.455.327,00**		**226.489.455.297,00**		**226.489.455.327,00**		
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**20.900.564.000,00**		**24.118.132.383,00**		**24.118.132.383,00**		**24.118.132.383,00**		**24.118.132.383,00**		
Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi (%)	100	100	20.900.564.000,00	100	24.118.132.383,00	100	24.118.132.383,00	100	24.118.132.383,00	100	24.118.132.383,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi (%)	100	100		100		100		100		100			
1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai regulasi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai regulasi	100,00	100,00	65.000.000,00	100,00	442.741.500,00	100,00	259.211.798,00	100,00	172.717.215,00	100,00	189.988.937,00		
1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	65.000.000,00	8	142.741.500,00	8	157.015.650,00	8	172.717.215,00	8	189.988.937,00		
1.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)			0		0		0		0		0		
1.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)			0		0		0		0		0		
1.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)			0		0		0		0		0		
1.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)			0		0		0		0		0		
1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6		0,00	6	100.000.000,00	6	102.196.148,00	6	0,00	6	0,00		
1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6		0,00	6	100.000.000,00	6	0,00	6	0,00	6	0,00		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1		0,00	1	100.000.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi	Persentase Dokumen Keuangan disusun sesuai regulasi	100,00	100,00	17.229.805.000,00	100,00	17.229.805.000,00	100,00	17.229.805.000,00	100,00	17.229.805.000,00	100,00	17.229.805.000,00		
1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	14	17.229.805.000,00	14	17.229.805.000,00	14	17.229.805.000,00	14	17.229.805.000,00	14	17.229.805.000,00		
1.03.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)			0		0		0		0		0		
1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)			0		0		0		0		0		
1.03.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)			0		0		0		0		0		
1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	100,00	100,00	1.500.000,00	100,00	329.945.000,00	100,00	362.939.500,00	100,00	399.233.450,00	100,00	439.156.795,00		
1.03.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	50	0	0,00	50	219.945.000,00	50	241.939.500,00	50	266.133.450,00	50	292.746.795,00		
1.03.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100	100	1.500.000,00	100	110.000.000,00		121.000.000,00	100	133.100.000,00	100	146.410.000,00		
1.03.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			0		0		0		0		0		
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Terlaksananya Fasilitasi Administratif umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi	Persentase Fasilitasi Administrasi umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan sesuai regulasi	100,00	100,00	406.349.000,00	100,00	810.822.433,00	100,00	851.475.790,00	100,00	936.623.369,00	100,00	851.475.790,00		
1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	1	6.400.000,00	1	22.000.000,00	1	24.200.000,00	1	26.620.000,00	1	24.200.000,00		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	9	14.000.000,00	9	198.515.900,00	9	218.367.490,00	9	240.204.239,00	9	218.367.490,00		
1.03.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	4	70.699.000,00	4	88.000.000,00	4	96.800.000,00	4	106.480.000,00	4	96.800.000,00		
1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	45.500.000,00	2	94.193.000,00	2	103.612.300,00	2	113.973.530,00	2	103.612.300,00		
1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7	7	60.060.000,00	7	82.500.000,00	7	90.750.000,00	7	99.825.000,00	7	90.750.000,00		
1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	65.000.000,00	2	13.750.000,00	2	15.125.000,00	2	16.637.500,00	2	15.125.000,00		
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	120	120	144.690.000,00	120	311.863.533,00	120	302.621.000,00	120	332.883.100,00	120	302.621.000,00		
1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Millik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100,00	100,00	104.500.000,00	100,00	860.524.580,00	100,00	736.577.038,00	100,00	678.234.742,00	100,00	600.418.216,00		
1.03.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	35.000.000,00	1	300.000.000,00	4	120.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
1.03.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar														
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
1.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel														
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	29	55	34.500.000,00	55	120.524.580,00	55	132.577.038,00	55	145.834.742,00	55	160.418.216,00		
1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	4	35.000.000,00	4	440.000.000,00	4	484.000.000,00	4	532.400.000,00	4	440.000.000,00		
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100,00	100,00	2.571.050.000,00	100,00	3.119.871.870,00	100,00	3.221.259.057,00	100,00	3.098.967.987,00	100,00	3.044.481.963,00		
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4	385.050.000,00	4	880.000.000,00	4	968.000.000,00	4	830.983.024,00	4	798.292.504,00		
1.03.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	24	24	80.000.000,00	24	133.871.870,00	24	147.259.057,00	24	161.984.963,00	24	178.183.459,00		
1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.106.000.000,00	12	2.106.000.000,00	12	2.106.000.000,00	12	2.106.000.000,00	12	2.068.006.000,00		
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	100,00	522.360.000,00	100,00	1.324.422.000,00	100,00	1.456.864.200,00	100,00	1.602.550.620,00	100,00	1.762.805.682,00		
1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	164	164	229.320.000,00	164	330.000.000,00	164	363.000.000,00	164	399.300.000,00	164	439.230.000,00		
1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perawatan dan Perizinan Alat Berat														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	23	23	100.000.000,00	23	275.000.000,00	23	302.500.000,00	23	332.750.000,00	23	366.025.000,00		
1.03.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel														
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)			0		0		0		0		0		
1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	60	60	130.540.000,00	60	220.000.000,00	60	242.000.000,00	60	266.200.000,00	60	292.820.000,00		
1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	9	9	62.500.000,00	9	499.422.000,00	9	549.364.200,00	9	604.300.620,00	9	664.730.682,00		
1.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			0		0		0		0		0		
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				**909.200.000,00**		**17.858.018.615,00**		**17.858.018.615,00**		**19.858.018.615,00**		**19.858.018.615,00**		
Meningkatnya pengelolaan sumber daya air	Persentase jaringan sumber daya air dalam kondisi baik (%)	28,74	29,20	909.200.000,00	29,57	17.858.018.615,00	29,93	17.858.018.615,00	30,30	19.858.018.615,00	30,67	19.858.018.615,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (%)	14,93	15,5		16		16,5		17		17,5			
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota (%)	0,45	0,6		0,7		0,8		0,9		1			
	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	70,84	71,5		72		72,5		73		73,5			
	Indeks kinerja sistem irigasi (IKSI) kewenangan Kabupaten/Kota (Angka)	51,77	55,12		56,26		57,36		58,48		59,60			
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
Terkelolanya sungai dan bangunan pengaman pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang sungai dan bangunan pengaman pantai yang dikelola pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (km)		1,59	906.580.000,00	1,99	6.805.000.000,00	2,09	5.545.500.000,00	2,29	5.825.050.000,00	2,49	5.426.514.615,00		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.02.2.01.0073 - Operasi dan Pemeliharaan Sungai														
Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	0,65	0,65	800.500.000,00	0,75	1.715.000.000,00	0,75	1.086.500.000,00	0,85	1.165.150.000,00	0,95	1.001.665.900,00		
1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai														
Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	0,6	0,6	104.000.000,00	0,9	3.640.000.000,00	1	3.204.000.000,00	1,1	3.494.400.000,00	1,2	3.563.840.000,00		
1.03.02.2.01.0105 - Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya														
Terehabilitasinya Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi (KM)	0,34	0,34	1.040.000,00	0,34	1.340.000.000,00	0,34	784.000.000,00	0,34	832.400.000,00	0,34	635.640.000,00		
1.03.02.2.01.0120 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai														
Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	2	2	1.040.000,00	2	110.000.000,00	2	471.000.000,00	2	333.100.000,00	2	225.368.715,00		
1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
Terkelolanya Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan dan dikelola		1,10	2.620.000,00	1,50	11.053.018.615,00	1,70	12.312.518.615,00	1,90	14.032.968.615,00	2,10	14.431.504.000,00		
1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														
Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	0	0	0,00	0,3	1.110.000.000,00	0,4	421.000.000,00	0,5	433.100.000,00	0,6	196.410.000,00		
1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	1,03	1,1	1.580.000,00	1,2	8.828.684.000,00	1,3	9.628.684.000,00	1,4	11.128.684.000,00	1,5	12.378.684.000,00		
1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	0,16	0,2	1.040.000,00	0,3	604.334.615,00	0,4	1.060.000.000,00	0,5	1.260.000.000,00	0,6	1.210.000.000,00		
1.03.02.2.02.0045 - Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air														
Rencana Alokasi Air yang Ditetapkan	Jumlah rekomendasi kebijakan alokasi air yang disiapkan, dilaksanakan dan diawasi (Dokumen)	0	0	0,00	1	110.000.000,00	1	452.834.615,00	1	511.184.615,00	1	196.410.000,00		
1.03.02.2.02.0050 - Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa														
Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	2	4	0,00	4	400.000.000,00	4	750.000.000,00	4	700.000.000,00	4	450.000.000,00		
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				**4.800.000.000,00**		**10.000.000.000,00**		**10.000.000.000,00**		**10.000.000.000,00**		**10.000.000.000,00**		
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan ((%))	23,95	32,01	4.800.000.000,00	35,51	10.000.000.000,00	39,01	10.000.000.000,00	42,52	10.000.000.000,00	46,02	10.000.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	88,48	89,32		89,85		90,35		90,85		91,50			
1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota														
Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum (SR)	0	685,00	4.800.000.000,00	1.428,00	10.000.000.000,00	1.428,00	10.000.000.000,00	1.428,00	10.000.000.000,00	1.428,00	10.000.000.000,00		
1.03.03.2.01.0024 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Orang)	0	37	0,00	37	0,00	37	0,00	37	0,00	37	0,00		
1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	0	0	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	77,16	77,16	4.800.000.000,00	80,25	10.000.000.000,00	83,46	10.000.000.000,00	86,79	10.000.000.000,00	90,27	10.000.000.000,00		
1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	0	0	0,00	15	0,00	15	0,00	15	0,00	15	0,00		
1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	0	0	0,00	5.859,00	0,00	5.859,00	0,00	5.859,00	0,00	5.859,00	0,00		
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				**100.000.000,00**		**3.450.814.487,00**		**4.418.595.000,00**		**4.418.595.000,00**		**4.418.595.000,00**		
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase terbangunnya sarana prasarana persampahan sesuai standar (%)	25	33,89	100.000.000,00	36,21	3.450.814.487,00	38,53	4.418.595.000,00	40,84	4.418.595.000,00	43,16	4.418.595.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota														
Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarpras persampahan sesuai standar yang dibangun dan direhabilitasi			100.000.000,00		3.450.814.487,00		4.418.595.000,00		4.418.595.000,00		4.418.595.000,00		
1.03.04.2.01.0009 - Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota														
Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit)			0		0		0		0		0		
1.03.04.2.01.0012 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan														

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan yang mendapatkan Pengembangan Kapasitas	Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)			0		0		0		0		0		
1.03.04.2.01.0013 - Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														
Meningkatnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan (Ton/hari)		0	0,00	12,07	1.440.741.120,00	12,02	1.442.957.645,00	12,03	1.443.046.306,00	12,04	1.444.800.000,00		
1.03.04.2.01.0015 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan														
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)			0		0		0		0		0		
1.03.04.2.01.0016 - Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														
Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi (Unit)			0		0		0		0		0		
1.03.04.2.01.0017 - Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														
Tersedianya Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
1.03.04.2.01.0018 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan														
Masyarakat yang mendapatkan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (Orang)			0		0		0		0		0		
1.03.04.2.01.0019 - Pembinaan dan Pengawasan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														
Terbina dan Terawasinya pengelola/operator dalam pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah pengelola/operator yang dibina dan diawasi dalam pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS (Pengelola)			0		0		0		0		0		
1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R														
Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)	233,08	233,08	100.000.000,00	0	2.010.073.367,00	0	2.975.637.355,00	0	2.975.548.694,00	0	2.973.795.000,00		
1.03.04.2.01.0021 - Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Desa														
Terbinanya pengelola Sistem Pengelolaan Persampahan di Desa	Jumlah unit Sistem Pengelolaan Persampahan di Desa yang terbina (Unit)			0		0		0		0		0		
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				**640.420.900,00**		**2.050.449.180,00**		**2.050.449.180,00**		**2.050.449.180,00**		**2.050.449.180,00**		
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))	54,13	57,17	640.420.900,00	58,57	2.050.449.180,00	59,97	2.050.449.180,00	61,37	2.050.449.180,00	62,77	2.050.449.180,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	97,27	98,00		98,50		99,00		99,50		100			
1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota														
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (unit)		128,00	640.420.900,00	410,00	2.050.449.180,00	410,00	2.050.449.180,00	410,00	2.050.449.180,00	410,00	2.050.449.180,00		
1.03.05.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman														
Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (MÅ³/Hari)	108	108	640.420.900,00	108	2.050.449.180,00	126	2.050.449.180,00	126	2.050.449.180,00	126	2.050.449.180,00		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.05.2.01.0027 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat														
Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan (MÂ³/Hari)			0		0		0		0		0		
1.03.05.2.01.0036 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)														
Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (MÂ³/Hari)			0		0		0		0		0		
1.03.05.2.01.0040 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Orang)			0		0		0		0		0		
1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat														
Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)			0		0		0		0		0		
1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)			0		0		0		0		0		
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				**2.080.000,00**		**100.000.000,00**		**100.000.000,00**		**100.000.000,00**		**100.000.000,00**		
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik (%)	76,62	76,69	2.080.000,00	76,76	100.000.000,00	76,83	100.000.000,00	76,9	100.000.000,00	76,97	100.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota														
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang dikelola (meter)	10	2,00	2.080.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00		
1.03.06.2.01.0024 - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan														
Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Perkotaan)			0		0		0		0		0		
1.03.06.2.01.0028 - Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan														
Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	5	5	1.040.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00		
1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan														
Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)			0		0		0		0		0		
1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan														

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	10	10	1.040.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00		
Panjang Saluran Drainase yang dibangun dan direhabilitasi				0		0		0		0		0		
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				**101.040.000,00**		**3.932.071.700,00**		**3.932.071.700,00**		**3.932.071.700,00**		**3.932.071.700,00**		
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Rasio Kepatuhan PBG (%)	71,43	80	101.040.000,00	82,26	3.932.071.700,00	85,71	3.932.071.700,00	88,57	3.932.071.700,00	91,43	3.932.071.700,00	1.03.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik (%)	78	79		80		81		82		83			
1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung														
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Jumlah dokumen rekomendasi penyelenggaraan penerbitan SLF / PBG		200,00	101.040.000,00	210,00	3.932.071.700,00	210,00	3.932.071.700,00	210,00	3.932.071.700,00	210,00	3.932.071.700,00		
1.03.08.2.01.0018 - Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksanaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	1	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.03.08.2.01.0019 - Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung														
Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)			0		0		0		0		0		
1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	0	0,00	2	3.932.071.700,00	2	3.932.071.700,00	2	3.932.071.700,00	2	3.932.071.700,00		
1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)		150	1.040.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				**130.000.000,00**		**29.999.999,00**		**29.999.999,00**		**29.999.969,00**		**29.999.999,00**		
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya (%)	48	60	130.000.000,00	70	29.999.999,00	80	29.999.999,00	90	29.999.969,00	100	29.999.999,00	1.03.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota														
Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan yang dibangun/ditata		1,00	130.000.000,00	1,00	29.999.999,00	1,00	29.999.999,00	1,00	29.999.969,00	1,00	29.999.999,00		
1.03.09.2.01.0010 - Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)			0		0		0		0		0		
1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota														
Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	1	1	130.000.000,00	1	29.999.999,00	1	29.999.999,00	1	29.999.969,00	1	29.999.999,00		
1.03.09.2.01.0012 - Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan														
Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan penataan dan lingkungan	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (Orang)			0		0		0		0		0		
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				**95.113.263.000,00**		**151.000.000.000,00**		**151.000.000.000,00**		**161.000.000.000,00**		**161.000.000.000,00**		
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota (%)	75,05	78,79	95.113.263.000,00	80,29	151.000.000.000,00	81,79	151.000.000.000,00	83,29	161.000.000.000,00	84,79	161.000.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota														
Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan Kabupaten yang ditangani		60,15	95.113.263.000,00	68,93	151.000.000.000,00	68,93	151.000.000.000,00	74,38	161.000.000.000,00	74,38	161.000.000.000,00		
1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	16	25	2.970.000.000,00	40	4.400.000.000,00	40	4.400.000.000,00	50	5.500.000.000,00	50	5.500.000.000,00		
1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	765,72	765,72	765.000.000,00	765,72	765.000.000,00	765,72	765.000.000,00	765,72	765.000.000,00	765,72	765.000.000,00		
1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan														
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	46,20	12,85	14.178.263.000,00	16,55	19.135.000.000,00	16,55	19.135.000.000,00	20	22.535.000.000,00	20	22.535.000.000,00		
1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan														
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	2,00	15,5	17.050.000.000,00	12	33.000.000.000,00	12	33.000.000.000,00	13,2	36.300.000.000,00	13,2	36.300.000.000,00		
1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan														
Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	17,50	16,4	45.100.000.000,00	18,18	66.000.000.000,00	18,18	66.000.000.000,00	18,18	66.000.000.000,00	18,18	66.000.000.000,00		
1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan														
Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	7	8	1.870.000.000,00	10	2.200.000.000,00	10	2.200.000.000,00	10	2.200.000.000,00	10	2.200.000.000,00		
1.03.10.2.01.0068 - Pelebaran Jalan Menuju Standar														

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (KM)	4	5,4	11.880.000.000,00	7,2	19.800.000.000,00	7,2	19.800.000.000,00	8	22.000.000.000,00	8	22.000.000.000,00		
1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan														
Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	2	2	1.300.000.000,00	5	5.700.000.000,00	5	5.700.000.000,00	5	5.700.000.000,00	5	5.700.000.000,00		
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				**125.000.000,00**		**141.000.800,00**		**141.000.800,00**		**141.000.800,00**		**141.000.800,00**		
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	1,32	18	125.000.000,00	21	141.000.800,00	25	141.000.800,00	30	141.000.800,00	35	141.000.800,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi														
Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi (kegiatan)		2,00	21.000.000,00	2,00	33.000.000,00	2,00	36.300.000,00	2,00	39.930.000,00	2,00	43.923.000,00		
1.03.11.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														
Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	30	40	21.000.000,00	40	33.000.000,00	40	36.300.000,00	40	39.930.000,00	40	43.923.000,00		
1.03.11.2.01.0011 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	5	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00		
1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
Terlaksananya penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis informasi tingkat kabupaten pada sistem informasi jasa konstruksi (SIPJAKI)		2,00	104.000.000,00	2,00	108.000.800,00	2,00	104.700.800,00	2,00	101.070.800,00	2,00	97.077.800,00		
1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota														
Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	1	2	104.000.000,00	2	108.000.800,00	2	104.700.800,00	2	101.070.800,00	2	97.077.800,00		
1.03.11.2.02.0014 - Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI														
Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)			0		0		0		0		0		
1.03.11.2.02.0015 - Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi														
Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)			0		0		0		0		0		
1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi														
Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				-		-		-		-		-		
1.03.11.2.04.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														
Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)			0		0		0		0		0		
1.03.11.2.04.0006 - Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi														

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)			0		0		0		0		0		
1.03.11.2.04.0007 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														
Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)			0		0		0		0		0		
1.03.11.2.04.0010 - Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota														
Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota (Dokumen)			0		0		0		0		0		
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				**383.005.000,00**		**841.187.650,00**		**841.187.650,00**		**841.187.650,00**		**841.187.650,00**		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi (Persentase)	100	100	383.005.000,00	100	841.187.650,00	100	841.187.650,00	100	841.187.650,00	100	841.187.650,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota														
Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	jumlah dokumen penetapan RTRW (dokumen)		1,00	70.005.000,00	1,00	250.000.000,00	1,00	250.000.000,00	1,00	250.000.000,00	1,00	250.000.000,00		
1.03.12.2.01.0003 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang														
Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	70.005.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.03.12.2.01.0005 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota														
Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)			0		0		0		0		0		
1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota														
Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)			0		0		0		0		0		
1.03.12.2.01.0007 - Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang														
Tersampaikannya informasi penataan ruang kepada masyarakat	Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi)			0		0		0		0		0		
1.03.12.2.01.0008 - Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota														
Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi (Dokumen)			0		0		0		0		0		
1.03.12.2.01.0009 - Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota														
Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi (Dokumen)			0		0		0		0		0		
1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota														
Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)			0		0	1,00	150.000.000,00	1,00	150.000.000,00	1,00	150.000.000,00		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.12.2.01.0011 - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota														
Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)			0	1,00	150.000.000,00		0		0		0		
1.03.12.2.01.0013 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang														
Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)			0		0		0		0		0		
1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota														
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi penyusunan RDTR dan RTRW kabupaten / kota yang dilaksanakan (kegiatan)		6,00	208.000.000,00	8,00	104.000.000,00	8,00	104.000.000,00	8,00	104.000.000,00	8,00	104.000.000,00		
1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota														
Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	104.000.000,00	2	104.000.000,00	2	104.000.000,00	2	104.000.000,00	2	104.000.000,00		
1.03.12.2.02.0006 - Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang														
Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)			0		0		0		0		0		
1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota														
Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	104.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
1.03.12.2.02.0008 - Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang														
Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawabMasyarakat	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Kegiatan)			0		0		0		0		0		
1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota														
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi dan simkronisasi pemanfaatan ruang Daerah kabupaten /Kota yang dilaksanakan			-	8,00	350.000.000,00	8,00	350.000.000,00	8,00	350.000.000,00	8,00	350.000.000,00		
1.03.12.2.03.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang														
Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen)			0		0		0		0		0		
1.03.12.2.03.0004 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang														
Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)			0	1,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00		
1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang														
Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)			0		0		0		0		0		
1.03.12.2.03.0007 - Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														
Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)			0	1,00	150.000.000,00	1,00	150.000.000,00	1,00	150.000.000,00	1,00	150.000.000,00		
1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota														

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi dan simkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang Daerah kabupaten /Kota yang dilaksanakan		8,00	105.000.000,00	8,00	137.187.650,00	8,00	137.187.650,00	8,00	137.187.650,00	8,00	137.187.650,00		
1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														
Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)		1,00	105.000.000,00	1,00	137.187.650,00	1,00	137.187.650,00	1,00	137.187.650,00	1,00	137.187.650,00		
1.03.12.2.04.0006 - Pelaksanaan Audit Tata Ruang														
Terlaksananya Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang (Kasus)			0		0		0		0		0		

https://jdih.pemalangkab.go.id

IV.2 URAIAN SUBKEGIATAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Uraian subkegiatan dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah sangat penting untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Subkegiatan prioritas harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi pedoman pembangunan daerah dan dapat diterjemahkan menjadi aksi-aksi nyata yang dapat diimplementasikan oleh DPU TR Kabupaten Pemalang. Subkegiatan harus dirancang dan dilaksanakan secara detail, dengan mempertimbangkan sumber daya, waktu, dan target capaian yang jelas.

Tabel IV.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS / PROGRAM AKSI BUPATI & WAKIL BUPATI	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jalan halus merata	Meningkatnya aksesbilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Program : Penyelenggaraan Jalan Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Rekonstruksi jalan Pelebaran jalan menuju standar Pemeliharaan berkala jalan Pemeliharaan Rutin Jalan	Tahun 2026 : Rekonstruksi Jalan (jalan yang mengalami kerusakan berat) sepanjang 38 Km Pelebaran Jalan Menuju Standar (untuk meningkatkan kapasitas dan kelancaran lalu lintas) Pemeliharaan Berkala Jalan, dan Pemeliharaan Rutin Jalan sepanjang 55 Km Tahun 2027 : Rekonstruksi Jalan (jalan yang mengalami kerusakan berat) sepanjang 38 Km Pelebaran Jalan Menuju Standar (untuk meningkatkan kapasitas dan kelancaran lalu lintas) Pemeliharaan Berkala Jalan, dan Pemeliharaan Rutin Jalan sepanjang 55 Km Tahun 2028 : Rekonstruksi Jalan (jalan yang mengalami kerusakan berat) sepanjang 38 Km Pelebaran Jalan Menuju Standar (untuk meningkatkan kapasitas dan kelancaran lalu lintas) Pemeliharaan Berkala Jalan, dan Pemeliharaan Rutin Jalan sepanjang 55 Km Tahun 2029 : Rekonstruksi Jalan (jalan yang mengalami kerusakan berat) sepanjang 38 Km Pelebaran Jalan Menuju Standar (untuk meningkatkan kapasitas dan kelancaran lalu lintas) Pemeliharaan Berkala Jalan, dan Pemeliharaan Rutin Jalan sepanjang 55 Km

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	PROGRAM PRIORITAS / PROGRAM AKSI BUPATI & WAKIL BUPATI	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN.
				Tahun 2030 : Rekonstruksi Jalan (jalan yang mengalami kerusakan berat) sepanjang 38 Km Pelebaran Jalan Menuju Standar (untuk meningkatkan kapasitas dan kelancaran lalu lintas) Pemeliharaan Berkala Jalan, dan Pemeliharaan Rutin Jalan sepanjang 55 Km
2	Revitalisasi penyediaan air bersih dari hulu sampai hilir	Meningkatnya kualitas dan akses layanan air bersih	Program : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan perpipaan	Tahun 2026 : 1.500 – 2.000 SR Tahun 2027 : 1.500 – 2.000 SR Tahun 2028 : 1.500 – 2.000 SR Tahun 2029 : 1.500 – 2.000 SR Tahun 2030 : 1.500 – 2.000 SR
3	Penyediaan lapangan kerja melalui program padat karya	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air	Program : Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Sungai Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (SatuDaerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Tahun 2026 : Pemeliharaan saluran sungai dan saluran irigasi Tahun 2027: Pemeliharaan saluran sungai dan saluran irigasi Tahun 2028 : Pemeliharaan saluran sungai dan saluran irigasi Tahun 2029 : Pemeliharaan saluran sungai dan saluran irigasi Tahun 2030 : Pemeliharaan saluran sungai dan saluran irigasi

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	PROGRAM PRIORITAS / PROGRAM AKSI BUPATI & WAKIL BUPATI	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN.
4	Pembukaan Pintu Tol Sewaka	Meningkatnya aksesbilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Program : Penyelenggaraan Jalan Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tahun 2026 : penyusunan kajian Feasibility Study (FS) Tahun 2027 : penyusunan kajian penyesuaian / penentuan trase jalan Tahun 2028 : penyusunan kajian pengadaan tanah Tahun 2029 : penyusunan kajian analisi mengenai dampak lingkungan (Amdal). Tahun 2030 : penyusunan kajian kelengkapan administrasi dan pengusulan

https://jdih.pemalangkab.go.id

IV.3. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DPU TR KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja utama DPU TR Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta menjadikan IKU tersebut sebagai prioritas utama.

https://jdih.pemalangkab.go.id

TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas								
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	71,28	72	73	74	75	76	77	
2	Persentase ketaatan terhadap RTRW	%	63	65	67,5	70	72,5	75	77,5	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	82,24	83	84	85	86	87	88	
4	Persentase penyelenggaraan infrastruktur urusan pekerjaan umum	%	57,61	60,54	62,54	64,69	66,94	69,30	71,68	
5	Nilai SAKIP OPD	Angka	66	70,10	70,5	70,76	72,36	73,96	75,56	

https://jdih.pemalangkab.go.id

IV.4. TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis DPU TR Kabupaten Pemalang. IKK membantu mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan, sehingga dapat digunakan untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi efektivitas suatu program atau kegiatan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI

RANCANGAN AKHIR RENSTRA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	positif	%	88,48	88,80	89,32	89,85	90,35	90,85	91,50	
2	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	positif	%	71,43	74,29	80,00	82,86	85,71	85,71	85,71	
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	positif	%	70,84	71,00	71,50	72,00	72,50	73,00	73,50	
4	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	positif	%	14,93	15,00	15,50	16,00	16,50	17,00	17,50	
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	positif	%	97,27	97,50	98,00	98,50	99,00	99,50	100,00	
6	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	positif	%	100	70	75	80	85	90	95	
7	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	positif	%	1,32	16,00	18,00	21,00	25,00	30,00	35,00	
8	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	positif	%	75,05	77,29	78,79	80,29	81,79	83,29	84,79	
9	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	positif	%	0,45	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,0	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB V
PENUTUP

5.1. KESIMPULAN PENTING SUBSTANSIAL

Kesimpulan penting substansial Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 telah mengadopsi upaya dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran visi "Pemalang Bercahaya" dan misi "RHAPSODI" pembangunan Kabupaten Pemalang dalam lima tahun ke depan.
2. Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 berdasarkan target-target yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan adalah meningkatnya konektivitas antar wilayah di Kabupaten Pemalang dengan sasaran meningkatnya kapasitas jalan.
3. Strategi, Kebijakan dan Program dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan infrastruktur serta dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yaitu Terwujudnya Pemalang Bercahahaya, Bersih, Cakap, Handal dan Mulya dan meralisasikan salah satu tujuan daerah yaitu meningkatnya daya saing pembangunan daerah .
4. Kegiatan dan Subkegiatan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan rincian aktivitas-aktivitas konkret yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kabupaten Pemalang.

5.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kabupaten PemalangTahun 2025-2029 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kabupaten Pemalang tahun 2026 sampai dengan tahun 2029, dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang pada tahun 2030 sebagai tahun transisi.

5.3. PELAKSANAAN PENGENDALIAN EVALUASI

Pelaksanaan pengendalian evaluasi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 bertujuan untuk memastikan pencapaian target program dan kegiatan, menilai kinerja serta mengendalikan risiko strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kabupaten Pemalang. Pengendalian memastikan bahwa program dan kegiatan sesuai dengan rencana, sedangkan evaluasi menilai pencapaian target dan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Dalam pelaksanaan pengendalian dilakukan minimal 1 (satu) kali selama periode 5 tahun (Periode Renstra).

https://jdih.pemalangkab.go.id

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Pemalang, September 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang

JOKO TRI ASMORO, ST., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760606 200501 1 021

https://dishub.pemalangkab.go.id

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah mencakup semua kegiatan pembangunan daerah dan sektoral yang berlangsung di daerah, yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Agar pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien maka diperlukan adanya suatu perencanaan yang matang hingga dapat terukur dan terarah atas pencapaian pembangunan yang diinginkan.

Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Selain itu, Renstra PD juga memperhatikan Renstra K/L dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Perhubungan sebagai pelaksana urusan perhubungan pada Pemerintah Pusat. Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Gambar 1.1.
Keterkaitan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Sektor Lainnya

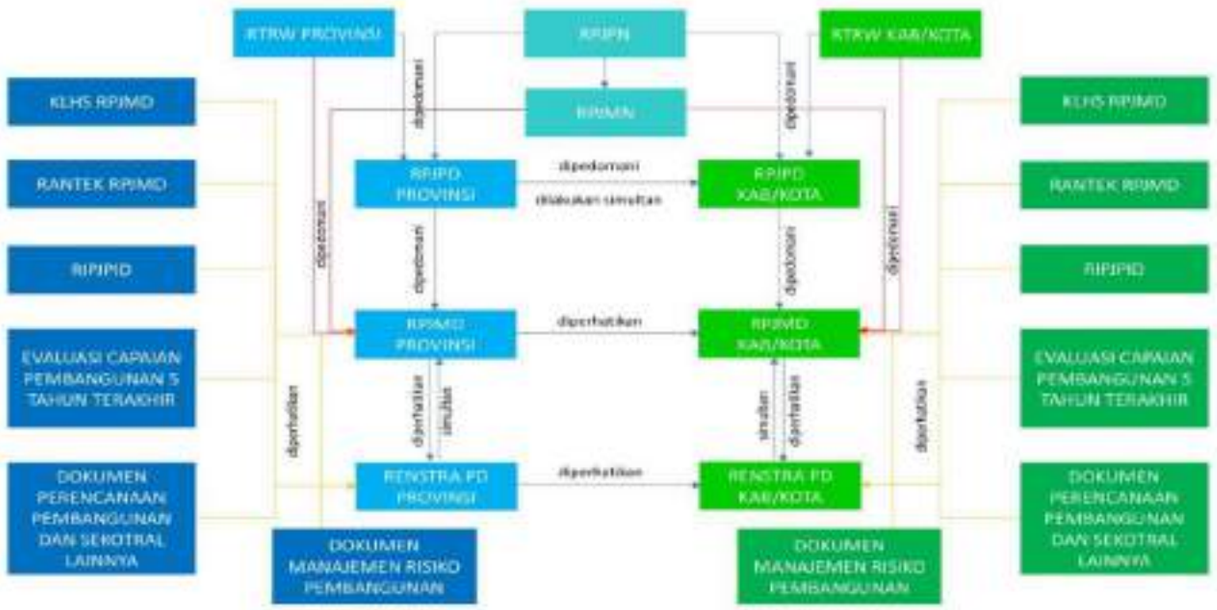

Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DP2KP) Kabupaten Pemalang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan. Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang mempunyai kewajiban untuk menetapkan Renstra Perangkat Daerah untuk periode lima tahunan.

Gambar 1.2.
Pentahapan Penyusunan Renstra

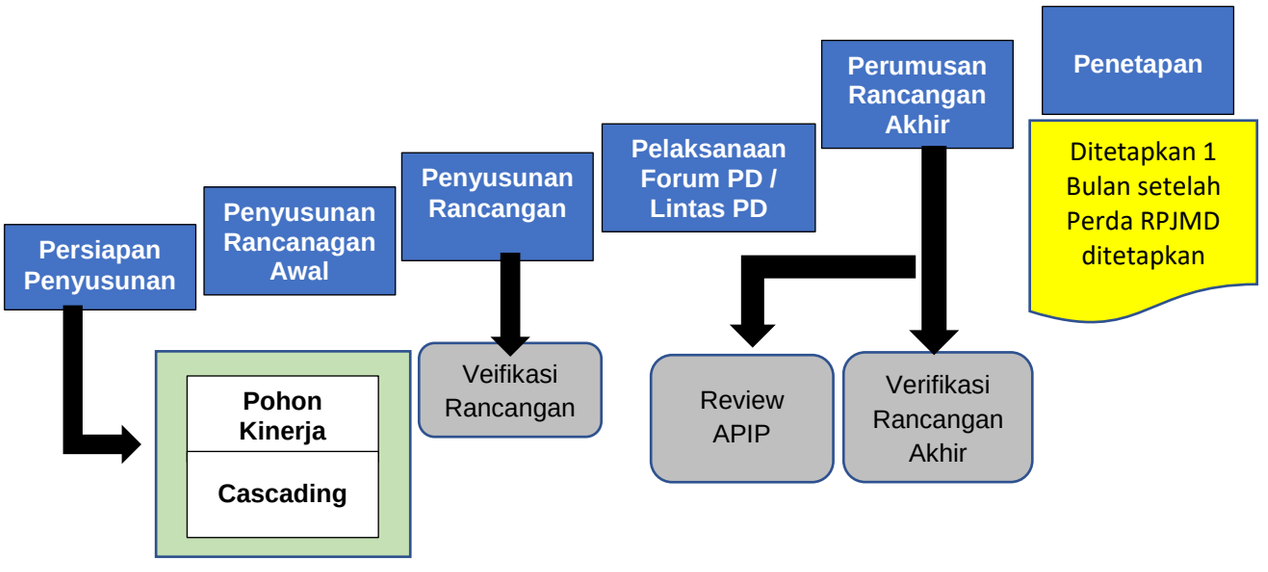

https://jdih.pemalangkab.go.id

Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu "**TERWUJUDNYA KABUPATEN PEMALANG YANG BERCAHAYA-BERSIH, CAKAP, HANDAL DAN MULYA**" dengan misinya **"RHAPSODI"** yaitu Resik, Hijau, Apik, Peduli, Silaturahmi, Organisatoris, Digitalisasi dan Ikhlas.

Untuk mendukung pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut, dokumen Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, dan menuntut kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi program dan kegiatan yang direncanakan. Selain itu Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029 juga harus berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029 adalah jawaban konkrit terhadap terciptanya pembangunan bidang perhubungan, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang efektif, efisien dan berkualitas yang merupakan tuntutan masyarakat Kabupaten Pemalang.

Selanjutnya Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang ini dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan perencanaan tahunan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD. Oleh sebab itu, penyusunan Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang ini menjadi sangat penting dan strategis dalam menentukan arah kebijakan di bidang perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

https://jdih.pemalangkab.go.id

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) yang telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
14. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Permukiman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6881);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
25. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga –Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang –Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
26. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
27. Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

https://jdih.pemalangkab.go.id

30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Kawasan Kumuh
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
37. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
39. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 76 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Transportasi Cerdas di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
40. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 646);
41. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016 tentang Tarif Dasar, Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61);
42. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Alat Pengendalian dan Pengamanan Pengguna Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 813);
43. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153);
44. Inmendagri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra. Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029

https://jdih.pemalangkab.go.id

sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 123);

46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi – Pemalang Tahun 2016 – 2036 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 123);
48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6)
49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029
50. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Perparkiran
51. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 10);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
56. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8).
57. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 -2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
59. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

https://jdih.pemalangkab.go.id

60. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 80);
61. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 77);
62. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 30);
63. Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Pemalang;
64. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
65. Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/108/2021 tentang Penetapan Tipe dan Lokasi Terminal Penumpang di Kabupaten Pemalang.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan dalam mewujudkan Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah.
2. Menjadi acuan resmi bagi Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan unsur penunjang bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan.
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang.
4. Sebagai dasar monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan

https://jdih.pemalangkab.go.id

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
2.1.2. Sumberdaya Perangkat Daerah
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah
2.2.2. Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah
3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah
3.3. Strategi Perangkat Daerah
3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif
4.2. Uraian Subkegiatan Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Subtansial
5.2. Kaidah Pelaksanaan
5.3. Pelaksanaan Pengendalian Evaluasi

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB 2
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang

Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang dibentuk melalui Peraturan Daerah Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

2.1.1.1. Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab pada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pelaksanaan Tugas Pokok Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang dilaksanakan oleh masing-masing Bidang dan Sekretariat.

1. **Kepala Dinas**

   Kepala Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

   1) Perumusan kebijakan di bidang angkutan dan lalu lintas, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan
   2) Pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan dan lalu lintas, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan
   3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan dan lalu lintas, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan
   4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
   5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya

   Kepala Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

   a. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan daerah (RKPD)
   b. Merumuskan usulaln Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja)

https://jdih.pemalangkab.go.id

c. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan
d. Mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan
e. Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan
f. Mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan sesuai dengan unsur SPIP
g. Mengarahkan pengelolaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan
h. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan
i. Merumuskan inovasi daerah urusan pemerintahan bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan
j. Merumuskan laporan di bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam melaksanakan tugas tersebut,Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
c. Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
d. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
e. Penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi
f. Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
g. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman

https://jdih.pemalangkab.go.id

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan.
b. Mengoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
c. Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan.
d. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengelolaan dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kedinasan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dokumentasi dan pengadaan barang/ jasa.
e. Menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian.
f. Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik.
g. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan sesuai dengan unsur SPIP.
h. Menyusun konsep inovasi kesekretariatan.
i. Mengoordinasikan konsep inovasi, kerjasama dan kemitraan perhubungan, dan pelaksanaan tugas bidang-bidang
j. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan.
k. Mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan pemerintahan bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

3. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program dan keuangan. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. merencanakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan dokumen perencanaan.
b. menyusun usulan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
c. melaksanakan pengelolaan administrasi bina program dan keuangan.
d. mengelola data urusan pemerintahan bidang Perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan
e. melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran.
f. menyusun konsep dokumen pertanggungjawaban kinerja yang meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP), Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dokumen pertanggungjawaban lainnya.
g. menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas

https://jdih.pemalangkab.go.id

(LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta laporan keuangan lainnya.

h. menyiapkan bahan inovasi Subbagian Bina Program dan Keuangan
i. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang Perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan
j. mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Bina Program dan Keuangan.
k. menyusun bahan laporan urusan pemerintahan bidang Perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan
l. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan.
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. merencanakan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
b. mengelola administrasi barang milik daerah meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pengamanan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, penatausahaan, pemanfaatan dan penyusunan laporan barang milik daerah.
c. mengelola administrasi umum, meliputi surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan.
d. mengelola administrasi kehumasan meliputi keprotokolan dan informasi publik.
e. mengelola administrasi kerumahtanggaan meliputi pengadaan, penyediaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan jasa penunjang, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas.
f. mengelola administrasi kepegawaian.
g. mengelola ketatalaksanaan meliputi penyusunan sistem dan prosedur kerja.
h. melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik.
i. menyiapkan bahan inovasi Subbagian Umum dan Kepegawaian.
j. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian.
k. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian.
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

https://jdih.pemalangkab.go.id

a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan dokumen rencana kerja organisasi perangkat daerah.
b. menyusun rancangan kebijakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
c. merumuskan kebijakan teknis di penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi Penyediaan Perlengkapan Jalan, Rencana Induk Jarigan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten, Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten, Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten, Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten, Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan, Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten,nPenerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten, dan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan.
d. menyusun konsep inovasi pada Bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
f. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
g. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Kepala Seksi Angkutan Jalan

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Angkutan Jalan. Kepala Seksi Angkutan Jalan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Angkutan Jalan.
b. menyiapkan konsep kebijakan pada Seksi Angkutan Jalan.
c. menyiapkan konsep kebijakan teknis pada Seksi Angkutan Jalan.
d. melaksanakan kegiatan Seksi Angkutan Jalan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
e. Melaksanakan program penyelenggaraan Lalu luntas Angkutan Jalan yang meliputi kegiatan : Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten, Penerbitan Izin

https://jdih.pemalangkab.go.id

Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten, Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten, dan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten.

f. menyusun bahan kebijakan angkutan yang meliputi Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten, Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dan Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten, Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten, dan rencana umum jaringan lintas angkutan barang.
g. menyusun bahan pertimbangan teknis dan penerbitan perizinan Usaha Angkutan.
h. melaksanakan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan, Tarif Angkutan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan sesuai Standar Pelayanan Minimal pada angkutan umum dan Sistem Manajemen Keselamatan.
i. melaksanakan kegiatan pelatihan *safety driving* terhadap pengemudi angkutan
j. menyusun konsep inovasi pada Seksi Angkutan Jalan.
k. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Angkutan Jalan.
l. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Angkutan Jalan.
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

7. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan

Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan. merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan

a. merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan
b. menyiapkan konsep kebijakan pada Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan
c. menyiapkan konsep kebijakan teknis pada Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan
d. melaksanakan kegiatan Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
e. melaksanakan program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) yang meliputi kegiatan: Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten, Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten
f. melaksanakan kegiatan manajeman dan rekayasa lalu lintas.
g. Menyusun bahan pengembangan manajemen rekayasa lalu lintas guna mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
h. melakukan analisa terhadap volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

i. melaksanakan pemantauan terhadap arus lalu lintas di kawasan tertentu dan persimpangan.
j. menyusun perencanaan perlengkapan jalan kabupaten dengan melaksanakan survey dan identifikasi untuk pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan.
k. melaksanakan kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten, sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan dan pengendalian efektifitas kebijakan untuk jalan kabupaten dan Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas
l. menyusun konsep inovasi pada Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan
m. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan
n. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

8. Kepala Seksi Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kepala Seksi Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Lalu Lintas dan Angutan Jalan.

a. merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
b. menyiapkan konsep kebijakan pada Seksi Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
c. menyiapkan konsep kebijakan teknis pada Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
d. melaksanakan kegiatan Seksi Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
e. melaksanakan program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) yang meliputi kegiatan: Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten, Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi;
f. melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan jalan secara teratur dan berkala.
g. melaksanakan pengawasan, perawatan pengadaan dan penempatan rambu-rambu dan fasilitas jalan.
h. mengelola penyediaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan rambu-rambu lalu lintas serta infrastruktur perkeretaapian yang terintegrasi sesuai kewenangan kabupaten
i. menyusun konsep inovasi pada Seksi Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
j. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
k. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

https://jdih.pemalangkab.go.id

9. Kepala Bidang Perumahan dan Pertanahan

Kepala Bidang Perumahan dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Kepala Bidang Perumahan dan Pertanahan mempunyai fungsi :

a. merencanakan program dan kegiatan Bidang Perumahan dan Pertanahan sesuai dengan dokumen perencanaan.
b. menyusun rancangan kebijakan Bidang Perumahan dan Pertanahan.
c. merumuskan kebijakan teknis di bidang perumahan dan pertanahan.
d. menyelenggarakan fasilitasi perencanaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan yang meliputi, penyusunan data dan informasi bangunan perumahan korban bencana, pendataan tanah/rumah, penghunian persewaan dan pemeliharaan rumah milik pemerintah berdasarkan hasil survey; verifikasi pengajuan proses Sertifikasi Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG); serta pengajuan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta penelitian nilai retribusi IMB.
e. menyelenggarakan fasilitasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan yang meliputi, fasilitasi bantuan teknis bidang perumahan dengan cara pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan baik BUMN, BUMD dan lembaga perorangan atau swasta; fasilitasi kegiatan pembangunan/pemeliharaan rumah milik pemerintah, perumahan, rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya; serta fasilitasi penanganan masalah sengketa bidang perumahan.
f. menyelenggarakan fasilitasi pertanahan yang meliputi penyusunan data pertanahan yang meliputi data tanah aset pemerintah, tanah kosong, ulayat dan sengketa; fasilitasi penyelesaian sengketa tanah dengan cara menginventarisasi permasalahan, mengkaji, mengoordinasikan dengan pihak bersengketa; verifikasi pengajuan Izin Membuka Tanah dengan cara memeriksa kelengkapan berkas, koordinasi dan cek lokasi; serta fasilitasi pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum dengan cara sosialisasi, negosiasi, survey harga tanah.
g. menyelenggarakan pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus meliputi lokasi pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus dan rumah susun negara dengan mempertimbangkan daya tampung lingkungan.
h. menyelenggarakan verifikasi bahan pengajuan penerbitan Advice Planning (AP) dan pemberian pertimbangan teknis penerbitan Site Plan, serta verifikasi pengajuan rekomendasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan kawasan permukiman.
i. menyusun konsep inovasi pada Bidang Perumahan dan Pertanahan.
j. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Perumahan dan Pertanahan.
k. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Perumahan dan Pertanahan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

l. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Perumahan dan Pertanahan.
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

10. Kepala Bidang Kawasan Permukiman

Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kawasan permukiman.

Dalam melaksanakan tigas tersebut, Kepala Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

a. merencanakan program dan kegiatan Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan dokumen perencanaan.
b. menyusun rancangan kebijakan Bidang Kawasan Permukiman.
c. merumuskan kebijakan teknis di bidang infrastruktur kawasan permukiman.
d. menyelenggarakan fasilitasi pendataan dan perencanaan di bidang kawasan permukiman yang meliputi penyusunan data dan informasi kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana, utilitas umum kawasan permukiman yang meliputi Penerangan Jalan Umum, Listrik Pedesaan, Pertamanan, Trotoar, Boullevard dan prasarana sarana umum lainnya; penyiapan dokumen kelengkapan serah terima prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman; fasilitasi pendanaan dan pembiayaan dalam rangka penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); pengendalian teknis kawasan permukiman; perencanaan parasarana, sarana dan utilitas umum tingkat kemampuan kecil; serta pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kawasan Permukiman, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Regristrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
e. menyelenggarakan fasilitasi pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman yang meliputi pembangunan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan/ pemeliharaan prasarana, sarana, utilitas umum kawasan permukiman (Penerangan Jalan Umum, Listrik Pedesaan, Pertamanan, Trotoar, Boullevard dan Prasarana Sarana Umum lainnya); serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
f. menyelenggarakan fasilitasi pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman yang meliputi pembinaan dan bimbingan teknis penyediaan kawasan permukiman dan pengendalian kawasan permukiman kumuh; penyediaan kawasan permukiman, dan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, pengembangan kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba); serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
g. menyusun konsep inovasi pada Bidang Kawasan Permukiman.
h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Kawasan Permukiman.
i. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Kawasan Permukiman.
j. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Kawasan Permukiman.
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

https://jdih.pemalangkab.go.id

11. Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran (UTPP)

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran Pada Dinas Perhubungan kabupaten Pemalang, uraian tugas Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran sebagai berikut :

a. Kepala UTPP

Kepala UTPP mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1) Merencanakan program dan kegiatan UTPP sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran
2) Menyusun konsep kebijakan manajemen pengelolaan terminal penumpang dan pengelolaan perparkiran sesuai dengan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas
3) Melaksanakan pengelolaan perencanaan program dan anggaran sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan
4) Menyusun dan menganalisa data yang meliputi terminal penumpang dan perparkiran sebagai bahan penyusunan kebijakan manajemen terminal penumpang dan perparkiran
5) Melaksanakan pengendalian ketertiban terminal melalui pengaturan kendaraan yang berada dalam terminal, pengaturan ketertiban lalu lintas dalam dan sekitar terminal dan pangkalan di wilayahnya
6) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan perparkiran secara efektif untuk ketertiban dan menjaga kualitas pelayanan perparkiran
7) Menyusun bahan pertimbangan teknis rekomendasi perizinan pengelolaan parkir, penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum
8) Melaksanakan pembinaan melalui bimbingan penyuluhan kepada pengelola parkir dan/atau petugas parkir
9) Melaksanakan penyusunan, pengendalian dan pengawasan jam perjalanan (time table) pemberangkatan angkutan penumpang umum di Terminal
10) Melaksanakan pemungutan retribusi di lingkungan terminal dan retribusi perparkiran sesuai ketentuan yang berlaku guna peningkatan pendapatan asli daerah
11) Merencanakan penyediaan dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana terminal dan perparkiran sesuai pedoman pelaksanaan untuk mendukung kelancaran operasional kegiatan
12) Menyiapkan bahan inovasi UTPP berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik
13) Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan UTPP sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

https://jdih.pemalangkab.go.id

b. Kepala Subbagian Tata Usaha
Kepala Subbagian Tata Usaha UTPP mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan program dan kegiatan pada UTPP sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran
2) Menyusun usulan rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Rencana kerja dan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pada UTPP dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
3) Melaksanakan pengelolaan administrasi pada UTPP sesuai dengan pedoman perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi
4) Menyusun data informasi pengelolaan UTPP guna pengambilan kebijakan
5) Mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan kepegawaian guna tertib administrasi
6) Mengelola administrasi kerumahtanggaan meliputi pemeliharaan perlengkapan, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor secara efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas
7) Menyiapkan bahan inovasi Subbagian Tata Usaha pada UTPP berdasarkan identifikasi kerja dan kualitas pelayanan public
8) Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha pada UTPP sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

12. Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (UPKB)

Unit Pelaksana Unit Pengujian Kendaraan Bermotor memiliki tugas untuk melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengujian kendaraan bermotor. Fungsi dari UPKB adalah sebagai berikut :
a. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor
b. Pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Tugas pokok dan fungsi personil Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (UPKB) adalah :
a. Kepala UPKB mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1) Merencanakan program dan kegiatan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran
2) Menyusun konsep pengelolaan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai dengan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas

https://jdih.pemalangkab.go.id

3) Melaksanakan pengelolaan perencanaan program dan anggaran, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan
4) Melaksanakan pengelolaan uji berkala kendaraan bermotor sesuai pedoman pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin obyektivitas hasil pengujian kendaraan bermotor yang tepat dan akurat
5) Melaksanakan pemungutan retribusi dan hasil biaya pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk tertib administrasi dan mencegah adanya pungutan liar
6) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengujian berkala kendaraan bermotor secara intensif dan terintegrasi untuk menjamin obyektivitas pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor
7) Menyusun data informasi pengelolaan UPKB guna pengambilan kebijakan
8) Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada pada UPKB sesuai pedoman pelaksanaan untuk mendukung kelancaraan operasional kegiatan
9) Menyiapkan bahan inovasi UPKB berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik
10) Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan UPKB sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

b. Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut :
1) Merencanakan program dan kegiatan pada UPKB sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran
2) Membuat usulan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada UPKB dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman Pelaksanaan kegiatan
3) Melaksanakan pengelolaan administrasi pada UPKB sesuai dengan pedoman perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi
4) Menginventarisir data informasi pengelolaan UPKB guna pengambilan kebijakan
5) Mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6) Mengelola administrasi kerumahtanggaan meliputi pemeliharaan perlengkapan, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan di lingkungan UPKB secara efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas

https://jdih.pemalangkab.go.id

7) Menyiapkan bahan inovasi subbagian tata usaha pada UPKB berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik
8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas subbagian tata usaha pada UPUKB sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja
9) Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan subbagian tata usaha pada UPKB sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

13. Kepala Unit Pengelola Rusunawa

Dasar Hukum tentang uraian tugas jabatan struktural unit pengelola rumah susun sederhana sewa pada dinas perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Pemalang ada pada Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang

a. Merencanakan program dan kegiatan UP Rusunawa sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran
b. Menyusun konsep penyelenggaraan pengelolaan rumah susun sederhana sewa sesuai dengan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas
c. Melaksanakan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan
d. Mengoordinir, menginventarisir, memantau dan melaksanakan tugas pengelolaan rumah susun sederhana sewa meliputi : pemanfaatan fisik bangunan, tingkat hunian, administrasi keuangan, kelembagaan, dan penghapusan dan pengembangan guna kelancaran tugas
e. Menyelenggarakan pembinaan teknis terhadap fungsi-fungsi penunjang pengelolaan rumah susun sederhana sewa guna tertib pengelolaan
f. Melakukan inventarisasi dan peningkatan kualitas sarana prasarana dan utilitas rumah susun sederhana sewa dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keamanan
g. Melaksanakan pendaftaran, pemeriksaan/verifikasi dan penetapan calon penghuni rumah susun sederhana sewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna tertib hunian rumah susun sederhana sewa.
h. Melaksanakan perjanjian sewa menyewa rumah susun sederhana sewa yang ditandatangani penghuni dan pengelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna tertib administrasi.
i. Melaksanakan penarikan uang sewa yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna tertib administrasi.
j. Mengelola administrasi keuangan UP Rusunawa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

https://jdih.pemalangkab.go.id

k. Menyiapkan bahan inovasi UP Rusunawa berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik
l. Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan UP Rusunawa sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2.1.1.2 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
   1. Sub Bagian Bina Program dan Keuangan
   2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri dari:
   1. Kepala Seksi Angkutan Jalan
   2. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan
   3. Kepala SeksiPengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
d. Kepala Bidang Perumahan dan Pertanahan
e. Kepala Bidang Kawasan Permukiman
f. UPTD, dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi

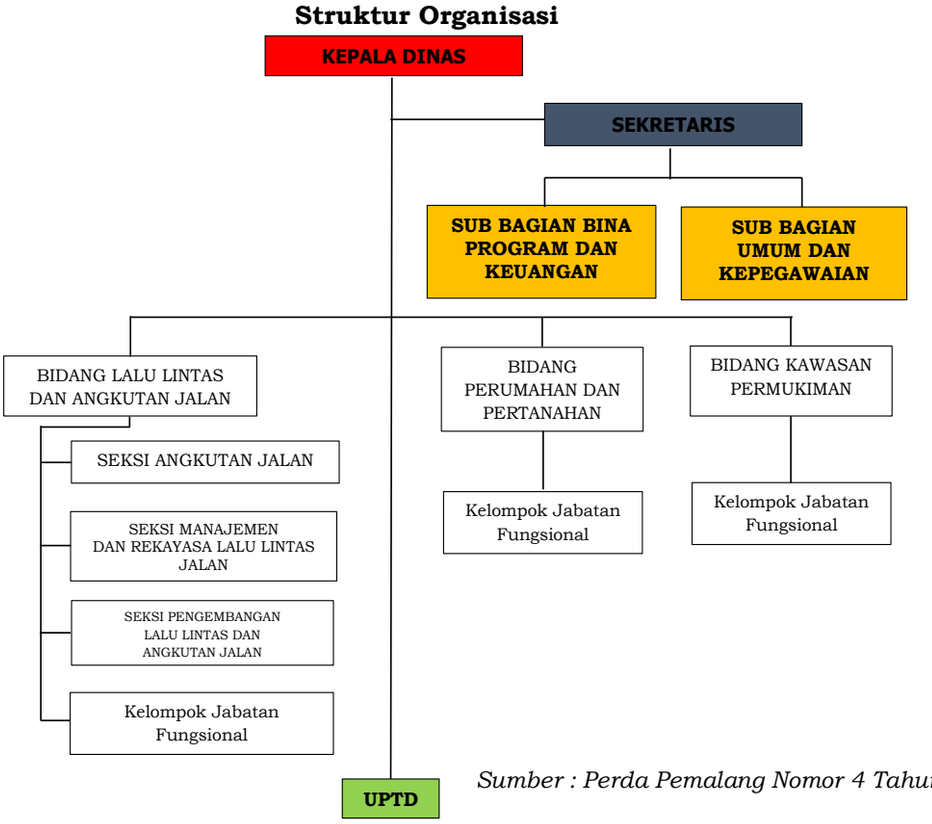

Sumber : Perda Pemalang Nomor 4 Tahun 2025

2.1.2.Sumber Daya Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang didukung dengan personalia dan sarana prasarana yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang pada tahun 2024 sebanyak 380 orang yang terdiri dari 109 orang berstatus PNS dan 271 orang berstatus Non PNS. Sebagian besar SDM Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang berpendidikan SLTA/sederajat yang terdiri 37 orang PNS dan 186 orang Non PNS. Dari sisi gender, SDM manusia Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang didominasi laki-laki yang mencapai 78,68% dan perempuan sebanyak 21,32%.

Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang yang cukup besar ini merupakan kekuatan dan memiliki peran vital dalam mencapai tujuan organisasi.

Tabel 2.1.
Sumberdaya Manusia Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
1	SD	12	-	4	-	**16**
2	SMP Sederajat	15	-	5	-	**20**
3	SMA Sederajat	32	5	161	25	**223**
4	D2	2	-	-	2	**4**
5	D3	10	3	4	7	**24**
6	D IV / S1	18	6	32	31	**87**
7	S2	4	2	-	-	**6**
	Jumlah	**93**	**16**	**206**	**65**	**380**

Sumber : Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2025

Tabel 2.2.
Sumberdaya Manusia Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Berdasarkan Golongan

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Golongan I	5	-	5
2	Golongan II	45	5	50
3	Golongan III	38	11	49
4	Golongan IV	4	-	4

Sumber : Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2025

b . Sarana Dan Prasarana

Selain Sumberdaya Manusia, sarana dan prasarana atau aset yang dimiliki Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang juga memiliki peran penting yang membantu organisasi mencapai tujuan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.3.
Daftar Barang Inventaris

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1	Tanah Bangunan	Bidang	-	-	14
2	Mesin Ketik Manual Portable	Unit	-	-	14
3	Sofa	Set	-	-	9
4	Sepeda Motor	Unit	-	-	93
5	Filling Cabinet Besi	Buah	-	-	33
6	AC Window	Unit	-	-	47
7	Loudspeaker	Unit	-	-	6
8	Meja Tamu Biasa	Buah	-	-	3
9	Lemari Buku Arsip	Buah	-	-	6
10	PC Unit	Unit	-	-	43
11	Televisi	Unit	-	-	13
12	Wireless	Set	-	-	4
13	Digital Audio Taperecorder	Set	-	-	2
14	Grating Generator Unit	Unit	-	-	1
15	Alat Kalibrasi Lainnya	Buah	-	-	12
16	Lemari Kaca	Buah	-	-	18
17	Dispenser	Buah	-	-	12
18	Compressor Unit	Unit	-	-	1
19	Portable Water Pump	Unit	-	-	2
20	Lemari Kayu	Buah	-	-	22
21	White Board	Buah	-	-	4
22	Audio Amplifier	Unit	-	-	5
23	Pick Up	Unit	-	-	4
24	Rak Besi	Buah	-	-	9
25	Mesin Penghisap Debu	Unit	-	-	5
26	Karaoke	Set	-	-	1
27	Microphone	Set	-	-	5
28	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	Buah	-	-	3
29	Internet	Set	-	-	4
30	Printer	Unit	-	-	84
31	Scanner	Unit	-	-	4
32	Server	Set	-	-	2
33	Rambu Bersuar Lainnya	Unit	-	-	8
34	Station Wagon	Unit	7	1	23
35	Meja kerja Pejabat Eselon II	Buah	-	-	4
36	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Buah	-	-	8
37	Compact Disc Player	Set	-	-	1
38	Handy Talky (HT)	Buah	-	-	20
39	Alat Komunikasi Sosial	Set	-	-	3
40	Peralatan Jaringan Lainnya	Set	-	-	6
41	Stationary Generating Set	Set	-	-	2
42	Alat Pembersih Lainnya	Set	-	-	4
43	Alat Komunikasi Radio ssb	Set	-	-	2
44	Rak Peralatan	Buah	-	-	1
45	Switcher/ Menara Antena	Set	-	-	1
46	Pompa Lainnya	Unit	-	-	2

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
47	Perkakas Bengkel Listrik Lainnya	Set	-	-	3
48	Alat Penghancur Kertas	Unit	-	-	2
49	Projector	Unit	-	-	6
50	Filling Cabinet Kayu	Buah	-	-	1
51	Meja Resepsionis	Buah	-	-	1
52	Meja Komputer	Buah	-	-	24
53	Perkakas Konstruksi Logam Yang Transportable	Set	-	-	2
54	Alat Penarik Lainnya	Buah	-	-	1
55	Insulation Res Meter Mod	Buah	-	-	1
56	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Buah	-	-	3
57	Alat Uji Kendaraan Bermotor	Unit	-	-	1
58	Guandrial	Buah	-	-	1
59	Transportable Compressor	Unit	-	-	1
60	UPS	Set	-	-	1
61	Kardex Besi	Buah	-	-	1
62	Bangunan Gedung	Unit	-	-	77
63	Mini Bus	Unit	-	-	2
64	Kursi Putar	Unit	-	-	25
65	Mesin Pemotong Rumput	Unit	-	-	16
66	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	Set	-	-	26
67	Buffet Kayu	Buah	-	-	2
68	Camera Electronic	Unit	-	-	9
69	Tripod Camera	Buah	-	-	4
70	Facsimile	Unit	-	-	3
71	Perkakas Bengkel Listrik	Set	-	-	1
72	Lemari Besi	Buah	-	-	17
73	Rak Besi	Buah	-	-	3
74	Brandkas	Buah	-	-	3
75	Papan Visual/Nama	Buah	-	-	3
76	Kursi Kayu	Buah	-	-	24
77	Meja Rapat	Buah	-	-	10
78	Meja ½ Biro	Buah	-	-	65
79	Lemari Es	Unit	-	-	2
80	Kipas Angin	Unit	-	-	16
81	Alat pemadam/ Portable	Buah	-	-	3
82	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Buah	-	-	3
83	Peralatan Studio Audio	Set	-	-	7
84	Laptop	Unit	-	-	51
85	Peralatan Personal Komputer	Set	-	-	14
86	Gerobak Tarik	Buah	-	-	19
87	Exhause Fan	Unit	-	-	5
88	Meja kerja Pegawai Non Struktural	Buah	-	-	13
89	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	Buah	-	-	14
90	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Buah	-	-	20
91	Telephone	Unit	-	-	5
92	Rak Kayu	Buah	-	-	16
93	Alat Kantor lainnya	Set	-	-	17

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
94	Meubeler lainnya	Buah	-	-	13
95	Kursi Lipat	Buah	-	-	104
96	Sound System	Unit	-	-	6
97	Modem	Buah	-	-	1
98	Rambu Jalan	Buah	-	-	58
99	Bangku Tunggu	Buah	-	-	5
100	Tombol Kebakaran	Buah	-	-	1
101	Portable Generating Set	Set	-	-	2
102	Mesin Fotocopy Folio	Unit	-	-	1
103	Mesin Absensi	Unit	-	-	5
104	Camera Video	Unit	-	-	9
105	Power Amplifier	Unit	-	-	2
106	Unit Tranceiver VHF Stationary	Unit	-	-	3
107	Traffic Light	Buah	-	-	8
108	Rambu Cermin	Buah	-	-	5
109	Papan Pengumuman	Buah	-	-	13
110	Kursi Tamu	Buah	-	-	4
111	Diesel Smoke Tester	Unit	-	-	1
112	Rambu Tidak Bersuar Lainnya	Buah	-	-	5
113	Kursi Rapat	Buah	-	-	23
114	Telephone Mobile	Unit	-	-	2
115	Signal Kereta Api	Buah	-	-	1
116	Tool Kit	Set	-	-	2
117	Alat Pendinginan Lainnya	Unit	-	-	3
118	Video Audio Jack Panel	Set	-	-	3
119	Peralatan Pemancar Lainnya	Set	-	-	1
120	Kursi Kerja Eselon III	Buah	-	-	2
121	CCTV	Unit	-	-	5
122	Jam Mekanis	Buah	-	-	14
123	Peta	Buah	-	-	2
124	Truck Crane	Unit	-	-	2
125	Kendaraan dinas bermotor perseorangan	Unit	-	-	1
126	Truck + Attachment	Unit	-	-	1
127	Mobil Tangki Air	Unit	-	-	3
128	Mesin Gergaji	Buah	-	-	3
129	Global Positioning System	Buah	-	-	4
130	Alat Ukur Lainnya	Buah	-	-	1
131	LCD Projector	Unit	-	-	1
132	Papan Nama Instansi	Buah	-	-	2
133	Meja Kerja Kayu	Buah	-	-	6
134	Kursi Besi/ Metal	Buah	-	-	16
135	Meja Tambahan	Buah	-	-	1
136	Meja Panjang	Buah	-	-	5
137	Kursi Biasa	Buah	-	-	10
138	AC Split	Unit	-	-	16
139	Alat Hiasan	Buah	-	-	1
140	Lambang Garuda Pancasila	Buah	-	-	1

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
141	Handy Cam	Unit	-	-	3
142	Meja Rapat Pejabat Lainnya	Buah	-	-	8
143	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	Buah	-	-	8
144	Kursi Rapat Ruang Rapat Staff	Buah	-	-	2
145	Kursi Tamu Ruang Pejabat Eselon II	Buah	-	-	1
146	Lemari Buku Arsip Pejabat Lainnya	Buah	-	-	1
147	Camera Film	Unit	-	-	1
148	Note Book	Unit	-	-	2
149	Tablet PC	Unit	-	-	2

Sumber : Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2024

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang

Untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat luas di Bidang Perhubungan, bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan sesuai tugas dan fungsi, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melaksanakan program dan kegiatan untuk melayani dan membina masyarakat.

2.1.3.1. Pelayanan Terminal

Berdasarkan SK Bupati Pemalang Nomor : 188.4/108/2021 tentang Penetapan Tipe dan Lokasi Terminal Penumpang di Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pemalang saat ini memiliki 9 terminal Tipe C yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang. Jumlah terminal ini tidak mengalami perubahan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir namun diperkirakan akan mengalami penurunan dengan beralihnya 2 terminal yaitu Terminal Angkot Petarukan dan Terminal Warungpring menjadi Pos Pantau. Terminal-terminal tersebut dikelola oleh Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran (UTPP) pada Dinas Perhubungan Pemalang yang memiliki tugas utama mengelola operasional dan penunjang kegiatan dinas terkait pengelolaan terminal. Tugas ini mencakup penertiban, pengamanan, pengaturan lalu lintas, pengawasan kendaraan, pemungutan retribusi, serta administrasi UPTD.

Tabel 2.4.
Pelayanan Terminal

NO	TIPE TERMINAL	LOKASI	KETERANGAN
1	C	Terminal Angkot Pemalang	
2	C	Terminal Angkot Petarukan	Direncanakan menjadi Pos Pantau
3	C	Terminal Angkot Comal	
4	C	Terminal Grosir Comal	
5	C	Terminal Randudongkal Lama	
6	C	Terminal Randudongkal Baru	
7	C	Terminal Moga	
8	C	Terminal Belik	
9	C	Terminal Warungpring	Direncanakan menjadi Pos Pantau
Jumlah 2024		**9**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

2023	**9**	
2022	**9**	
2021	**9**	
2020	**9**	

Sumber : SK Bupati Pemalang Nomor : 188.4/108/2021

2.1.3.2. Pelayanan Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan dan Perdesaan

Berdasarkan SK Bupati No 375 Tahun 1997, Jaringan trayek Angkutan Perkotaan yang ada di Kabupaten Pemalang saat ini terdapat 10 dengan jumlah kebutuhan armada mencapai 129 unit. Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang No 41 Tahun 2013, jalur trayek perdesaan saat ini terdapat 23 jalur trayek dengan jumlah armada 367 unit.

Tabel 2.5.
Jalur Trayek Angkutan Perkotaan

No	Jalur Trayek Angkutan Perkotaan	Jumlah Kebutuhan
1	Trayek A : Terminal Induk Kota Pemalang – Jl. Slamet Riyadi – Jl. Jendral Sudirman – Jl. Jend. A. Yani – Bojongbata – Sumberharjo – Bojongbata – Jl. Jend. A Yani – Jl. RE Martadinata – Jl. Veteran – Jl. Slamet Riyadi – Terminal Induk Pemalang.	10
2	Trayek B : Terminal Induk Kota Pemalang – Jl. Slamet Riyadi – Jl. Jend. Sudirman – Petarukan – Jl. Jend. Sudirman – Jl. Pemuda – Jl. Jend. A Yani – Jl. RE Martadinata – Jl. Veteran – Jl. Slamet Riyadi – Terminal Induk Kota Pemalang.	11
3	Trayek C : Terminal Induk Kota Pemalang – Jl. Slamet Riyadi – Jl. Jend. Sudirman – Beji – Jl. Jend. Sudirman – Jl. RE Martadinata – Widuri – Danasari – Bungin – Jl. Yos Sudarso – Jl. Jend. Sudirman – Jl. Kenanga – Jl. Veteran – Jl. Slamet Riyadi – Terminal Induk Kota Pemalang.	06
4	Trayek D : Terminal Induk Kota Pemalang – Jl. Slamet Riyadi – Jl. Jend. Sudirman – Jl. Jend. A Yani – Jl. KHA Dahlan – Tambakrejo – Bojongnangka – Sumberharjo – Bojongnangka – SMA Muhammadiyah – Jl. Cisadane – Jl. KH Samanhudi – Jl. Jend. Sudirman – Jl. Kenanga – Jl. Veteran – Jl. Slamet Riyadi – Terminal Induk Kota Pemalang.	09
5	Trayek E : Terminal Induk Kota Pemalang – Jl. Slamet Riyadi – Jl. Jend. Sudirman – Petarukan – Jl. Jend. Sudirman – Jl. Jend. A Yani – Jl. KHA Dahlan – Jl. Cisadane – Jl. KH Samanhudi – Jl. RE Martadinata – Jl. Veteran – Jl. Slamet Riyadi – Terminal Induk Kota Pemalang	25
6	Trayek F : Terminal Induk Kota Pemalang – Jl. Sslamet Riyadi - Jl. Jend. Sudirman – Beji – Banjardawa – Penggarit – Paduraksa - Jl. Jend. A Yani – Jl. Jend. Sudirman – Jl. Kenanga – Jl. Veteran – Jl. Slamet Riyadi – Terminal Induk Kota Pemalang.	16
7	Trayek G : Terminal Induk Kota Pemalang – Jl. Slamet Riyadi – Jl. Jend. Sudirman – Jl. Jend. A Yani – Paduraksa – Banjarmulya – Kramat – Mengori – Bojongbata – Jl. Jend. A Yani – Jl. Jend. Sudirman – Jl. Mawar – Jl. Kenanga – Terminal Induk Kota Pemalang.	10
8	Trayek G1 :	13

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Jalur Trayek Angkutan Perkotaan	Jumlah Kebutuhan
	Terminal Induk Kota Pemalang – Jl. Slamet Riyadi – Jl. Jend. Sudirman – Jl. Jend. A Yani – Bojongbata – Mengori – Kramat – Banjarmulya – Paduraksa – Jl. Jend. A Yani – Jl. Jend. Sudirman – Jl. Mawar – Jl. Slamet Riyadi – Terminal Induk Kota Pemalang.	
9	Trayek H : Terminla Induk Kota Pemalang – Jl. Slamet Riyadi – Jl. Jend. Sudirman – Beji – Kabunan – Asemdoyong – Loning – Asemdoyong – Beji – Jl. Jend. Sudirman – Jl. Jend. Urip Sumoharjo – Perum. Sugihwaras – Jl. Jend. Urip Sumoharjo – Alun-alun – Jl. Mawar – Jl. Slamet Riyadi – Terminal Induk Kota Pemalang	14
10	Trayek I : Terminal Induk Kota Pemalang – Jl. Slamet Riyadi – Jl. Jend. Sudirman – Beji – RSI – Pedurungan – Banjaran – Jebed – Banjardawa – Taman (BTN Taman Asri) – Jl. Jend. Sudirman – Alun-alun – Jl. RE Martadinata – Jl. Veteran – Jl. Slamet Riyadi – Terminal Induk Kota Pemalang	15

Sumber : SK Bupati No 375 Tahun 1997

Tabel 2.6.
Jalur Trayek Angkutan Perdesaan

No	Jalur Angkutan Pedesaan	Jumlah
	Untuk Wilayah Pemalang	
A	**Berpusat di Comal**	
1	Terminal Comal – Ampelgading – Karangtalok – Kemuning – Tegalsari – Kendalsari – Gondang – Jebed – Pasar Banjardawa PP	18
2	Terminal Comal – Bodeh – Kebandaran – Babakan – Kesesirejo – Kaliwadas – Jatingarang – Medayu – Cawet – Cikadu PP	20
3	Terminal Comal – Jatirejo – Panjunan – Kendaldoyong – Pesantren – Sikandang – Temuireng – Petarukan PP	25
4	Terminal Comal – Sidorejo – Gedek – Gintung – Sarwodadi – Susukan Mojo – Limbangan – Ketapang – Blendung PP	15
5	Terminal Comal – Ambokulon – Pagergunung – Pamutih – Blendung PP	10
6	Terminal Comal – Rowosari – Samong – Tasikrejo – Kaliprau – Blendung PP	15
7	Terminal Comal – Kauman – Susukan – Klegen – Sidokare – Panjunan – Kebojongan PP	6
8	Comal – Petarukan – Pemalang – Randudongkal PP	15
9	Comal – Pemalang – Moga PP	11
B	**Berpusat di Petarukan**	
1	Petarukan – Iser – Petanjungan – Karangasem – Widodaren – Comal PP	11
2	Klareyan – Tegalmlati – Petarukan – Serang – Sitemu – Gondang – Pener – Pengadegan – Petarukan – Bulu – Pegundan – Klareyan PP	21
	Untuk Wilayah Pemalang Bagian Selatan	
A	**Berpusat di Bantarbolang**	
1	Bantarbolang - Glandang – Kuta – Lenggerong – Paduraksa – Bojongbata – Jl. Gatot Subroto – Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo – Jl. Pemuda – Jl. Jendral Sudirman – Pasar Pagi PP	12
2	Bantarbolang – Karanganyar – Suru – Pedagung – Pasir – Kwasen – Kesesirejo PP	10
3	Bantarbolang – Kaliyurung – Semiliran – Kebongede – Klapa Nunggal – Peguyangan – Lenggerong – Silarang – Paduraksa – Bojongbata – Jl. Sulawesi – Jl. Tentara Pelajar – Jl. Dr.Cipto Mangunkusumo – Jl. Wahid Hasyim – Perhutani – Jl. Jendral Sudirman – BCA – Pasar Pagi Pemalang PP	12

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Jalur Angkutan Pedesaan	Jumlah
B	**Berpusat di Randudongkal**	
1	Terminal Randudongkal – Lodaya – Kalimas – Kajene – Kalitorong – Mangli – Tanahbaya PP	29
2	Terminal Randudongkal – Semaya – Wanarata – Bantarbolang PP	10
3	Terminal Randudongkal – Semingkir – Wisnu – Watukumpul PP	10
4	Terminal Randudongkal – Lodaya – Rembul – Cibuyur – Warungpring PP	33
5	Terminal Randudongkal – Sikasur – Bulakan – Belik – Watukumpul – Cikadu PP	25
6	Terminal Randudongkal – Mejagong – Kecepit – Kebanggan – Moga PP	22
C	**Berpusat di Moga**	
1	Terminal Moga – Sima – Walangsanga – Karangsari – Simpar PP	10
2	Terminal Moga – Pulosari – Pratin – Belik PP	8
3	Terminal Moga – Sima – Mandiraja – Gendoang – Pakembaran – Warungpring PP	19

Sumber : Peraturan Bupati Pemalang No 41 Tahun 2013

Perkembangan ijin trayek baik penggantian maupun perubahan nomor kendaraan yang telah dikeluarkan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7.
Perkembangan Ijin Trayek

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Ijin/SK Trayek yang dikeluarkan	7	33	22	19	24

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2024

2.1.3.3. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor bertujuan :

a. Memberikan jamman keselamatan secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala di jalan.
b. Mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala di jalan.
c. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Kendaraan wajib uji adalah kendaraan jenis mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. Bagi kendaraan yang lulus uji akan diberikan bukti lulus uji berupa Kartu Uji, sertifikat uji, dan tanda uji (stiker hologram).

Jenis layanan yang pada UPKB Pemalang, antara lain :

a. Pendaftaran kendaraan bermotor wajib uji
b. Uji berkala pertama
c. Uji berkala perpanjangan masa berlaku
d. Numpang uji masuk
e. Penerbitan rekomendasi numpang uji keluar daerah
f. Mutasi uji masuk
g. Penerbitan rekomendasi mutasi uji ke luar daerah
h. Pengujian berkala kendaraan bermotor karena rubah spesifikasi
i. Penilaian teknis kendaraan bermotor

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terdapat kecenderungan penurunan jumlah kendaraan yang diuji yaitu dari 6.591 unit di tahun 2020 menjadi 4.070 di tahun 2024. Sejak tahun 2024, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah menjadi dasar hukum utama di balik penghapusan biaya retribusi Uji KIR.

Tabel 2.8.
Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kendaraan yang diuji	6.591	5.626	4.687	4.108	4.070

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2024

2.1.3.4. Pelayanan Perlengkapan Jalan

Perlengkapan jalan sangat penting untuk menjaga keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas dengan memberi petunjuk, peringatan, dan larangan kepada pengendara, membantu mencegah kecelakaan dan memastikan perjalanan yang aman bagi semua pengguna jalan.

Sampai dengan tahun 2023 capaian kinerja pelayanan perlengkapan jalan hanya sebesar 66,33% dari jumlah perlengkapan jalan terpasang dengan kebutuhannya. Hal ini disebabkan kurangnya penyediaan perlengkapan setiap tahun yang mampu disediakan Dinas Perhubungan. Tabel di bawah ini menunjukan bahwa jenis perlengkapan jalan yang mampu disediakan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang setiap tahun.

Tabel 2.9.
Jumlah Perlengkapan Jalan

No	Jenis Fasilitas dan Perlengkapan Jalan	Tahun					Terpasang	Kebutuhan
		2020	2021	2022	2023	2024		
1.	RPPJ (Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan)	7	4	4	5	-	240	316
2.	Rambu (Semua ukuran)	-	-	4	-	-	1620	2741
3.	Rambu Penunjuk Jurusan	-	-	-	-	-	21	37
4.	Rambu Petunjuk Jalur Alternatif	-	-	-	-	-	48	85
5	Rambu Elektronik	-	-	-	-	-	1	8
6	Papan Nama Jalan	-	-	-	-	-	122	216
7	Rambu Himbauan	-	-	-	-	-	13	23
8	Delineator (Patok Jalan)	-	-	-	-	-	90	120
9	Guardrail (Pagar Pengaman) (Beam)	22	-	-	-	-	512	780
10	Cermin Tikungan	2	-	-	-	-	36	45
11	Marka Jalan (m2)	400	1200	552	220	-	12833,8	19068
12	Halte	-	-	-	-	-		
13	Traffic Light	2	-	-	-	-	21	30
14	Warning Light (Kedap-Kedip Kuning)	-	-	-	-	-	52	60
15	Counterdown Timer (Lampu Hitung Mundur)	-	-	-	-	-	12	21

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Jenis Fasilitas dan Perlengkapan Jalan	Tahun					Terpasang	Kebutuhan
		2020	2021	2022	2023	2024		
16	Pita Kejut	-	-	-	-	-	6	11
17	Pintu Perlintasan KA	-	-	1	-	1	9	11
TOTAL							**15637**	**23572**
CAPAIAN							**66,34%**	

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2024

2.1.3.5. Pelayanan Perparkiran

Pelayanan perparkiran yang dilakukan Dinas Perhubungan meliputi berbagai aspek pengelolaan perparkiran, mulai dari perencanaan dan penataan, hingga pengawasan dan penegakan hukum terkait perparkiran di jalan umum maupun tempat khusus parkir. Pelayanan perparkiran di Kabupaten Pemalang ini terbagi dalam 13 zona wilayah yang meliputi 10 kecamatan.

Tabel 2.10.
Pelayanan Perparkiran

NO	JENIS ZONA	LOKASI PARKIR
1	ZONA I (Wilayah Kec. Pemalang)	Jl. Jend. Sudirman (Selatan Jalan)
2	ZONA II (Wilayah Kec. Pemalang)	Jl. Jend. Sudirman (Utara Jalan)
3	ZONA III (Wilayah Kec. Pemalang)	a. Jl. Pemuda b. Jl. Ahmad Yani c. Jl. Merbabu d. Jl. Sindoro e. Jl. Gatot Subroto f. Jl. D.I Panjaitan g. Jl. Sulawesi h. Jl. Serayu i. Jl. Tangkuban Prahu j. Jl. Rinjani k. Jl. Kauman l. Jl. Cisedane
4	ZONA IV (Wilayah Kec.Pemalang)	a. Jl. Lingkar Alun-Alun Pemalang b. Jl. RE. Martadinata c. Jl. Urip Sumoharjo d. Jl. Menur e. Jl. Veteran f. Jl. Kenanga g. Jl. Slamet Riyadi h. Jl. Yos Sudarso i. Jl. Mawar j. Jl. KH Samanhudi k. Jl. Melat
5	ZONA V (Wilayah Kec. Taman)	a. Jl. Perintis Kemerdekaan b. Jl. Kolonel Sugiono c. Jl. Dr. Wahidin d. Jl. Piere Tendean e. Jl. Sirayak f. Jl. Raya Pasar Gondang g. Jl. Wahid Hasyim
6	ZONA VI (Wilayah Kec. Petarukan)	a. Jl. Raya Pantura Petarukan b. Jl. Kartini c. Jl. Perwira
7	ZONA VII (Wilayah Kec. Comal)	a. Jl. A. Yani Comal b. Jl. Lingkar Pasar Comal c. Jl. Kecamatan Ampelgading
8	ZONA VIII (Wilayah Kec. Randudongkal)	a. Jl. Raya Randudongkal sampai Moga

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	JENIS ZONA	LOKASI PARKIR
		b. Jl. Raya Randudongkal sampai Belik c. Jl. Raya Kecamatan Warungpring
9	ZONA IX (Wilayah Kec.Moga)	a. Jl. Raya Moga sampai Pulosari b. Jl. Raya Moga sampai Guci
10	ZONA X (Wilayah Kec.Belik)	a. Jl. Raya Belik sampai Randudongkal b. Jl. Raya Belik sampai Gombong
11	ZONA XI (Wilayah Kec. Warungpring)	Jl.Raya Warungpring
12	ZONA XII (Wilayah Kec. Bodeh)	a. Jl. Raya Kesesirejo b. Jl. Raya Pendowo sampai Bodeh
13	ZONA XIII (Wilayah Kec. Ulujami)	Jl. Raya Ulujami

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Pemalang tahun 2024

Tabel 2.11.
Tarif Retribusi Parkir

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif (Rp)
1	Sepeda Motor	1.000
2	Mobil penumpang, sedan, stasion, jeep, dan sejenisnya	2.000
3	Mobil barang, bus/microbus dan kendaraan khusus	3.000
4	Kereta dengan kereta tempelan, dan mobil barang yang roda lebih dari 8 (delapan)	5.000

Sumber : Perda Kabupaten Pemalang No. 7 Tahun 2023

2.1.3.6. Retribusi Daerah Bidang Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang pada tahun 2024 mengelola 2 jenis retribusi daerah yaitu retribusi pelayanan persampahan di terminal dan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Tabel 2.12.
Realisasi Retribusi Daerah Bidang Perhubungan

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
RETRIBUSI DAERAH	**1.312.727.500**	**1.473.552.000**	**1.561.054.500**	**1.466.820.000**	**712.563.000**
Retribusi Jasa Umum					**712.563.000**
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	**56.506.000**	**70.364.000**	**77.370.000**	**78.659.000**	**85.808.000**
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	**338.903.000**	**466.642.000**	**540.965.000**	**552.888.000**	**626.755.000**
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	**721.951.000**	**658.070.000**	**625.015.000**	**515.505.000**	**0**
Retribusi Terminal	**191.729.500**	**260.173.000**	**305.714.000**	**311.216.000**	**0**
Retribusi Izin Trayek	**3.638.000**	**18.303.000**	**11.990.500**	**8.552.000**	**0**

Sumber : Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2025

2.1.3.7. Pelayanan Persetujuan Teknis Andalalin

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Pemalang menyatakan bahwa Andalalin dimaksudkan untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur terhadap lalu lintas disekitarnya. Perkembangan pelayanan

https://jdih.pemalangkab.go.id

persetujuan teknis Andalalin setelah diterbitkannya Perbup Nomor 33 Tahun 2022 yang telah diberikan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13.
Jumlah Persetujuan Teknis Andalalin

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Persetujuan Teknis Andalalin	-	-	10	32	67

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2024

2.1.3.8. Pelayanan Keselamatan Jalan

Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang memiliki peran penting dalam pelayanan keselamatan jalan yang bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan dampaknya, serta meningkatkan keamanan pengguna jalan. Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas jalan, jumlah kejadian kecelakaan selalu meningkat setiap tahun dimana pada tahun 2024 terjadi 217 kejadian dengan jumlah korban meninggal sebanyak 147 orang. Kondisi init tentunya memerlukan upaya manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengoptimalkan kinerja jalan dan mengurangi potensi kecelakaan serta menyediakan perlengkapan keselamatan jalan, seperti rambu lalu lintas, marka jalan, dan lampu lalu lintas, untuk memastikan ketersediaan dan fungsinya.

Tabel 2.14.
Data Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

NO	KESATUAN	TAHUN	JML KEJ.	KORBAN			KERUGIAN MATERIIL
				MD	LB	LR	
1	RES PML	2018	343	133	2	351	274.050.000,-
2		2019	424	139	0	466	439.900.000,-
3		2020	461	100	1	507	248.550.000,-
4		2021	489	120	16	571	642.050.000,-
5		2022	604	107	35	644	681.900.000,-
4		2023	667	133	20	725	1.069.350.000,-
5		2024	712	147	8	781	1.168.100.000,-
JUMLAH							

Sumber : Kepolisian Resort Pemalang, Tahun 2024

2.1.3.9. Kebutuhan Rumah

Kebutuhan rumah atau Backlog Rumah adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah di Kabupaten Pemalang. Jumlah kebutuhan rumah di Kabupaten Pemalang pada tahun 2024 mencapai 17.174 unit. Sementara itu data series dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 hingga saat ini masih dalam proses perhitungan.

Tabel 2.15.
Data Jumlah Backlog Kabupaten Pemalang

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Backlog
1	2020	1.471.489	367.872	NA
2	2021	1.484.209	371.050	NA
3	2022	1.500.754	375.188	NA
4	2023	1.523.769	380.942	NA
5	2024	1.541.685	385.421	17.174

Sumber : BPS Kab Pemalang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2024

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.1.3.10. Rumah Tidak Layak Huni

Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015, realisasi RTLH selama lima tahun terakhir cenderung menurun yaitu dari 3.334 RTLH di tahun 2020 menurun menjadi 888 RTLH di tahun 2024. Sehingga sisa Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Pemalang yang masih tersisa di Tahun 2024 berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 adalah sebesar 52.104 RTLH. Perincian jumlah RTLH untuk masing-masing kecamatan selengkapnya dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.16.
Jumlah RTLH di Kabupaten Pemalang

NO	NAMA KECAMATAN	BDT	REALISASI RTLH TAHUN										SISA RTLH
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Ampelgading	1772	0	15	0	63	217	99	158	54	46	3	1117
2	Bantarbolang	4094	0	100	0	52	275	215	79	30	82	70	3191
3	Belik	15276	0	44	0	40	405	355	269	954	142	178	12889
4	Bodeh	3598	0	30	0	129	287	186	48	41	93	80	2704
5	Comal	2300	0	0	40	74	257	193	122	22	82	14	1496
6	Moga	6089	269	13	0	399	656	281	281	60	117	56	3957
7	Pemalang	3611	0	0	0	74	523	242	675	6	49	30	2012
8	Petarukan	4784	0	15	0	113	380	403	397	25	24	3	3424
9	Pulosari	6589	0	71	40	300	585	372	129	279	105	20	4688
10	Randudongkal	4294	13	50	0	36	152	391	24	36	149	84	3359
11	Taman	3571	0	15	116	84	303	121	171	37	52	5	2667
12	Ulujami	2734	0	0	0	94	264	75	80	54	33	0	2134
13	Warungpring	3430	0	0	0	38	59	133	36	390	18	102	2654
14	Watukumpul	8034	57	245	20	27	338	268	340	509	175	243	5812
	Jumlah Total	**70176**	**339**	**598**	**216**	**1523**	**4701**	**3334**	**2809**	**2497**	**1167**	**888**	**52104**

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2024

2.1.3.11. Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Karakteristik permukiman kumuh digambarkan dengan tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan masyarakat penghuninya yang rendah. Selain itu Permukiman kumuh atau slum merupakan kondisi permukiman dengan kualitas buruk dan tidak sehat, tempat perlindungan bagi kegiatan marjinal serta sumber penyakit epidemik yang akhirnya akan menular ke wilayah perkotaan.

Berdasarkan SK Nomor 188.4/308/ Tahun 2021 luas kawasan kumuh di Kabupaten Pemalang adalah sebesar 313,72 ha. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir telah dilakukan berbagai intervensi penanganan kawasan kumuh yaitu sebesar 80,57 ha di tahun 2021, sebesar 1,11 ha di tahun 2022, sebesar 15,09 ha di tahun 2023 dan sebesar 1,10 ha di tahun 2024. Dengan demikian sejak tahun 2021 telah dilakukan intervensi penangan kawasan kumuh sebesar 97,87 ha atau 31,20%. Jumlah kawasan kumuh di Kabupaten Pemalang pada akhir tahun 2024 mencapai 197,16 ha yang tersebar di berbagai kawasan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.17.
Kawasan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Tahun	SK	Luas Awal	Lokasi	Kecamatan	Luas Penanganan Permukiman Kumuh (Ha)	% intervensi / kumuh tertangani	Akumulasi intervensi kumuh tertangani (Ha)	Sisa Luas Permukiman Kumuh (Ha)	% Sisa luasan kumuh
2021	188.4/308/Tahun 2021	313,72	Mulyoharjo, Bojongbata, Paduraksa, Sewaka, Sugihwaras, Widuri, Lawangrejo, Banjardawa, Jebed Utara, Pedurungan, Banjaran, Wanarejan Selatan, Wanarejan Utara, Taman, Beji, Kabunan, Petarukan, Iser, Purwoharjo, Purwosari, Sidorejo, Sikayu, Pecangakan	Pemalang, Taman, Petarukan, Comal	80,57	25,68%	80,57	237,02	75,55%
2022	188.4/285/Tahun 2022	237,02	Kabunan	Taman	1,11	26,04%	81,68	235,91	73,96%
2023	-	235,91	Lawangrejo, paduraksa, sewaka, banjardawa	Pemalang, taman, Petarukan, Comal	15,09	30,85%	96,77	198,26	69,15%
2024	100.3.3.2/526/Tahun 2024	198,26	Pelutan	Pemalang	1,1	31,20%	97,87	197,16	68,80%

Sumber : Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.1.3.12. Prasarana dan Sarana Utilitas Umum

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

Jumlah perumahan di Kabupaten Pemalang sampai dengan awal tahun 2025 adalah sebanyak 109 lokasi. Dari 109 lokasi ini hanya 31 lokasi sudah diserah terimakan PSUnya. Rekapitulasi permohonan PSU perumahan di Kabupaten Pemalang selengkapnya dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.18.
Rekapitulasi Permohonan PSU

No	Aspek	Jumlah	Keterangan
1	Jumlah perumahan sampai dengan 2025	109	
2	Jumlah perumahan yang sudah diserah terimakan psu nya per Januari 2025	31	
3	Jumlah perumahan yang belum diserahkan psunya per Januari 2025	78	
4	Jumlah perumahan yang sudah mengajukan permohonan serah terima per Januari 2025	21	
5	Jumlah perumahan yang sudah dilakukan identifkasi awal serah terima PSU per Januari 2025	21	Sedang dilakukan identifikasi awal oleh BPN terkait luas dan jenis PSU nya

Sumber : Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang

2.1.3.13. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat.

Total jumlah RTH di Kabupaten Pemalang adalah sebesar 1.873,78 sebagaimana tabel berikut :

https://dishub.pemalangkab.go.id

Tabel 2.19.
Luas Ruang Terbuka Hijau

No	Kecamatan	Fungsi Kawasan		RTH Taman, Makam dan Hutan Kota Eksisting		RTH Sempadan SUTET		RTH Sempadan Sungai		RTH Sempadan Rel		RTH Sempadan Pantai		RTH Hutan	
		RTRW	SHP	SHP	Data Lap Akhir	SHP	Data Lap Akhir	SHP	Data Lap Akhir	SHP	Data Lap Akhir	SHP	Data Lap Akhir	SHP	Data Lap Akhir
1	Ampelgading	PPK	PKL	3,08	3,08	19,43	19,43	-	-	95,68	95,69	-	-	-	-
2	Bantarbolang	PPK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Belik	PKLP	PKLP	2,39	2,39	-	-	5,89	5,89	-	-	-	-	522,24	522,24
4	Bodeh	PPK	PKL	0,89	0,89	-	-	0,70	-	-	-	-	-	-	-
5	Comal	PKL	PKL	6,91	6,91	30,71	30,71	2,19	2,19	75,92	75,77	-	-	-	-
6	Moga	PKLP	PKLP	2,71	2,71	-	-	15,04	15,04	-	-	-	-	669,13	669,13
7	Pemalang	PKL	PKL	10,59	10,59	27,90	27,90	3,38	3,38	135,62	135,63	17,27	23,70	1,02	1,02
8	Petarukan	PPK	-	-	-	-	-	4,10	-	-	-	-	-	-	-
9	Taman	PPK	PKL	3,90	3,90	66,65	66,65	1,02	4,10	131,21	131,65	-	-	-	-
10	Ulujami	PPK	PKL	3,81	3,81	12,46	12,46	-	1,02	0,01	-	-	-	-	-
11	Pulosari	PPK	-	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-
12	Randudongkal	PKLP	PKLP	2,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Warungpring	PPK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Watukumpul	PPK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah			**36,41**	**34,28**	**157,15**	**157,15**	**38,32**	**27,52**	**438,44**	**438,74**	**17,27**	**23,70**	**1.192,39**	**1.192,39**

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2024

https://dishub.pemalangkab.go.id

2.1.3.14. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Rumah Susun di Kabupaten Pemalang yang dikenal dengan nama Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) terdiri dari 3 blok dengan total unit mencapai 256 unit sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.20.
Jumlah Unit Rumah Per Blok

No.	Blok	Tipe	Jumlah Unit	Keterangan
1	A	Tipe 24	99	Sudah diserahkan ke PEMDA
2	B	Tipe 24	99	Sudah diserahkan ke PEMDA
3	C	Tipe 36	58	Sudah diserahkan ke PEMDA

Sumber : Disperkim Kab Pemalang

2.1.3.15. Bantuan Keuangan Pendaftaran Tanah Sistematis dan Lengkap

Program sertifikasi lahan yang dilakukan pemerintah diwujudkan dengan pemberian bantuan keuangan untuk Pendaftaran Tanah Sistematis dan Lengkap (PTSL). Bantuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang tidak memiliki biaya untuk mengurus pendaftaran tanah yang dimiliki. Jumlah bantuan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 4.805.550.000 untuk 32.037 bidang yang meliputi 28 desa. Sementara itu sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 tidak ada realisasi bantuan program sertifikasi lahan dan dari APBD Kabupaten Pemalang.

Tabel 2.21.
Rekapitulasi Bantuan Keuangan PTSL

No	Tahun	Jumlah Desa	Target		Realisasi	
			Bidang	Bantuan Keuangan	Bidang	Bantuan Keuangan
1	2021	28	46.000	6.900.000.000	32.037	4.805.550.000
2	2022	23	29.575	0	29.575	0
3	2023	23	20.000	0	20.000	0
4	2024	21	22.082	0	22.082	0

Keterangan : Dari tahun 2022 Bantuan Keuangan untuk PTSL dari APBD II Kabupaten Pemalang tidak ada (Nihil)

2.1.3.16. Target dan Realisasi Kinerja Pelayanan

Untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat luas pada Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 telah menetapkan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi. Capaian kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Rasio Konektivitas

Target kinerja Rasio Konektivitas sebagai indikator yang membandingkan jumlah trayek yang melayani Kabupaten Pemalang dengan jumlah trayek yang seharusnya dibutuhkan berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan, 2021-2026 semakin meningkat dari 86,60%% di tahun 2021 menjadi 87,35% di tahun 2024. Dari target ini, realisasi kinerja Rasio Konektivitas hanya dapat tercapai di tahun 2022 dan tahun 2023 yang sebesar 87,30%. Sementara untuk 2021 dan tahun 2024 kinerjanya masih dibawah target yang ditetapkan yaitu

https://dishub.pemalangkab.go.id

sebesar 77,86% dan 71,42%. Penurunan kinerja rasio konektivitas ini disebabkan semakin berkurangnya jumlah trayek yang melayani wilayah Kabupaten Pemalang. Kurang diminatinya trayek ini disebabkan berkurangnya penumpang akibat beralihnya pilihan moda transportasi masyarakat dari penggunaan transportasi umum menjadi transportasi pribadi serta berkembangnya transportasi online.

b. Persentase Pelayanan Angkutan Jalan

Indikator persentase pelayanan angkutan jalan mengacu pada rasio jumlah armada atau layanan angkutan umum yang memenuhi standar kelayakan (laik jalan) atau standar kualitas pelayanan terhadap total armada atau layanan angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Pemalang. Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas dan kualitas pelayanan angkutan umum dalam suatu wilayah.

Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan 2021-2026, persentase pelayanan angkutan jalan ditargetkan meningkat dari 10,41% di tahun 2021 menjadi 43,24% di tahun 2024. Target ini hanya dapat dicapai untuk 3 tahun pertama, sedangkan realisasi kinerja pada tahun 2024 yang sebesar 39,53% masih dibawah target tahun 2024 yang sebesar 43,24%.

Realisasi kinerja yang belum dicapai pada tahun 2024 ini disebabkan banyaknya armada angkutan umum yang melayani berbagai trayek, kondisinya tidak laik jalan dan tidak adanya peremajaan kendaraan.

c. Level of Service (LOS)

Target Level of Service (LOS) yang tertuang dalam Renstra Dinas Perhubungan 2021-2026 diperkirakan akan menurun dari 0,44 di tahun 2021 menjadi 0,36 di tahun 2024. Dari target kinerja ini, kinerja Level of Service (LOS) menunjukan rasio capaian dalam 3 tahun pertama telah di atas 100%. Sementara untuk tahun 2024 capaian kinerjanya menurun menjadi dibawah 100% yaitu 94%. Data tersebut menunjukan bahwa dalam 3 tahun pertama Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang telah mampu meningkatkan kinerja fasilitas transportasi seperti faktor-faktor seperti sarana prasarana, perparkiran dan keselamatan jalan.

d. Indeks Kepuasan Masyarakat

Target Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2024 menunjukan target yang semakin meningkat, yaitu dari 77,54 di tahun 2021 menjadi 81,00 di tahun 2024. Secara umum target ini telah tercapai realisasinya dimana pada tahun 2024, capaikan kinerja IKM sebesar 81,97, yang artinya masyarakat semakin puas dengan pelayanan yang disediakan Dinas Perhubungan, Kabupaten Pemalang.

e. Persentase kawasan kumuh tertangani

Target kinerja pelayanan kawasan kumuh tertangani berdasarkan Renstra Disperkim 2021-2026 semakin meningkat dari 53,5% di tahun 2022 menjadi 83,5% di tahun 2024. Peningkatan ini ditargetkan karena ada kawasan kumuh yang tertangani yang semakin meningkat setiap tahun. Perbedaan perhitungan terjadi pada realisasi kinerja yang dihitung secara kumulatif dari luas awal berdasarkan No. 188.4/38/Tahun 2021 yang sebesar 312,72 ha. Realisasi kinerja menunjukan adanya peningkatan yang semakin baik dimana pada tahun 2024 sisa kawasan kumuh hanya tinggal 68,80%. Perbedaan perhitungan ini menyebabkan rasio capaian kinerja kawasan kumuh tidak dapat dipersandingkan.

https://dishub.pemalangkab.go.id

f. Persentase Cakupan wilayah kumuh di bawah 10 ha tertangani

Perbedaan perhitungan terjadi juga pada target kinerja pelayanan berdasarkan Renstra Disperkim 2021-2026 dimana kawasan kumuh yang dihitung berdasarkan luas total permukiman. Target kinerja pelayanan persentase cakupan wilayah kumuh di bawah 10 ha tertangani semakin meningkat dari 1,3% ditahun 2021 menjadi 0,4% di tahun 2024.

Sementara itu realisasi kinerja dihitung berdasarkan perhitungan secara kumulatif dari luas awal berdasarkan No. 188.4/38/Tahun 2021 yang sebesar 312,72 ha. Realisasi kinerja menunjukan adanya peningkatan yang semakin baik dimana pada tahun 2024 telah dilakukan penanganan kawasan kumuh di bawah 10 ha sebesar 31,20. Perbedaan perhitungan ini menyebabkan rasio capaian kinerja kawasan kumuh yang tertangani tidak dapat dipersandingkan.

g. Persentase kawasan permukiman yang memiliki PSU dalam kondisi baik

Persentase kawasan permukiman yang memiliki PSU dalam kondisi baik realisasinya masih jauh dibawah dari target yang diharapkan. Target indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah sebesar 80%, sementara realisasinya hanya sebesar 27,52%. Hal ini perlu upaya bagi Disperkim untuk meningkatkan pembangunan PSU dan pengelolaan PSU yang lebih efektif agar PSU yang dibangun memenuhi standar kualitas dan kuantitas yang diharapkan.

d. Persentase RTLH yang tertangani

Persentase RTLH yang tertangani, realisasinya juga masih jauh dibawah dari target yang diharapkan. Target indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah sebesar 37%, sementara realisasinya hanya sebesar 32,13%. Hal ini perlu upaya bagi Disperkim mengatasi keterbatasan sumber daya, permasalahan teknis dalam pelaksanaan, atau penggunaan data yang lebih akurat terkait RTLH yang perlu diperbaiki.

e. Persentase rumah layak huni bagi korban bencana

Persentase rumah layak huni bagi korban bencana, antara target dan realisasi kinerjanya telah sesuai yaitu mencapai 100%. Kondisi ini perlu dipertahankan melalui upaya berkelanjutan dalam pemenuhan dan peningkatan kualitas rumah. Hal ini meliputi perbaikan dan renovasi rumah yang rusak, penyediaan fasilitas dasar yang memadai, serta program bedah rumah atau bantuan pembangunan rumah baru. Selain itu, perlu dilakukan pendataan dan verifikasi penerima bantuan, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

f. Persentase rumah layak huni bagi korban/relokasi program

Persentase rumah layak huni bagi korban/relokasi program meskipun ditargetkan 100% namun dalam realisasinya tidak terdapat kegiatan pembangunan atau penanganan rumah layak huni bagi korban/relokasi program.

g. Persentase tanah garapan tertangani

Persentase tanah garapan tertangani juga ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 70% namun dalam realisasinya tidak terdapat kegiatan penanganan tanah garapan.

h. Persentase sertifikasi kepemilikan hak atas tanah terfasilitasi

Persentase sertifikasi kepemilikan hak atas tanah terfasilitasi juga ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 100% namun dalam realisasinya tidak terdapat fasilitasi sertifikasi kepemilikan hak atas tanah.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.22.
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Rasio Konektivitas				NA	86,60	86,85	87,10	87,35	NA	77,86	87,30	87,30	71,42	-	0,90	1,01	1,00	0,82
2	Persentase Pelayanan Angkutan Jalan				NA	10,81	21,62	32,43	43,24	NA	20,93	38,87	39,97	39,53	-	1,94	1,80	1,23	0,91
3	Level of Service				NA	0,44	0,44	0,43	0,36	NA	0,34	0,34	0,36	0,38	-	1,29	1,29	1,19	0,94
4	Indeks Kepuasan Masyarakat				NA	77,54	78,04	78,64	81,00	NA	78,40	78,70	77,71	81,97	-	1,01	1,01	0,99	1,01
5	Persentase kawasan kumuh tertangani				NA	53,5	63,5	73,5	83,5	NA	75,55	73,96	69,15	68,80	-	-	-	-	-
6	Persentase Cakupan wilayah kumuh di bawah 10 ha tertangani				NA	1,3	1.0	0.5	0.4	NA	25,68	26,04	30,85	31,20	-	-	-	-	-
7	Persentase kawasan permukiman yang memiliki PSU dalam kondisi baik				NA	50	60	70	80	NA	NA	22,94	26,61	27,52	-	-	38,23	32,30	34,40
8	Persentase RTLH yang tertangani\				NA	25	29	33	37	21,67	25,51	29,01	30,66	32,13	-	102,04	100,03	92,91	86,84
9	Persentase rumah layak huni bagi korban bencana				NA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	NA	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Persentase rumah layak huni bagi korban/relokasi program				NA	100	100	100	100	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
11	Persentase tanah garapan tertangani				NA	30	40	60	70	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
12	Persentase sertifikasi kepemilikan hak atas tanah terfasilitasi				NA	60	85	95	100	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-

https://dishub.pemalangkab.go.id

2.1.4. Kinerja Keuangan

Rasio penyerapan anggaran Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang untuk mendanai berbagai macam program dalam kurun waktu 4 tahun terakhir pada umumnya belum mencapai 100%. Rasio penyerapan tertinggi terdapat pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang mencapai 99% dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

Hal yang cukup menggembirakan dalam urusan bidang perhubungan adalah terjadinya pertumbuhan anggaran maupun realisasinya yang mencapai lebih dari 400%. Kenaikan anggaran ini memiliki dampak positif yang signifikan, terutama dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan di bidang perhubungan.

Sementara rasio penyerapan anggaran Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta bidang pertanahan untuk mendanai berbagai macam program dalam kurun waktu 4 tahun terakhir pada umumnya belum mencapai 100%. Rasio penyerapan tertinggi terdapat pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang mencapai 99,96% pada tahun 2024. Program ini juga cukup berhasil dengan terjadinya pertumbuhan realisasi anggaran yang mencapai 469,06%. Kenaikan anggaran ini memiliki dampak positif yang signifikan, terutama dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan di perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.23.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang

Program	Anggaran Tahun Ke (Rp. 000)					Realisasi Anggaran Tahun Ke (Rp. 000)					Rasio Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.715. 761.500	8.673. 940.000	12.391. 658.590	11.494 118.100	12.022 883.300	1.609. 459.713	8.451. 612.149	11.796. 381.396	11.260. 104.436	11.635 126.839	0,94	0,97	0,95	0,98	0,97	601%	623%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	409.073 000	3.047. 831.000	3.027. 368.010	2.511 829.000	2.257. 740.300	15.643. 549	2.969. 748.655	2.996. 971.909	2.492. 983.656	2.234. 020.923	0,04	0,97	0,99	0,99	0,99	452%	14181%
Program Pengelolaan Pelayaran	0	0	323.825. 400	5.700 400	NA	0	0	250.953 600	5.690. 000	NA	-	-	0,77	1,00	-	-	-
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	22.933.836 000	25.402. 044.000	25.663 811.000	25.767 903.000	-	22.525 417.000	24.528 363.287	25.164 038.643	24.580 035.294	-	98,22	96,56	98,05	95,39	12,36%	9,12%
Program Pengembangan Perumahan	4.623.523. 500	562.400 000	2.225 000.000	316.000 000	315.000 000	4.524.282 340	529.635 000	259.628. 643	308.256 461	308.242 456	97,85	94,17	11,67	97,55	97,85	-93,19%	-93,13%
Program Kawasan Permukiman	-	36.313.540 000	674.000 000	3.705 000.000	9.618. 400.000	-	30.856 774.000	666.311 010	3.698. 897.322	9.231. 818.603	-	84,97	98,95	99,84	95,98	-73,51%	-70,08%
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	-	442.000 000	125.000. 000	289.000 000	2.370. 000.000	-	416.315 000	122.079 516	288.295 700	2.369 066.000	-	94,19	97,66	99,76	99,96	436,20%	469,06%
Program Peningkatan Prasarana Dan	-	5.259.402 000	3.814. 000.000	7.005. 806.000	7.170. 000.000	-	5.160 611.000	3.797 729.496	6.844.310 260	7.155. 713.033	-	98,12	99,57	97,69	99,80	36,33%	38,66%

https://jdih.pemalangkab.go.id

Program	Anggaran Tahun Ke (Rp. 000)					Realisasi Anggaran Tahun Ke (Rp. 000)					Rasio Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Sarana Utilitas Umum (Psu)																	
Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Na	Na	Na	Na	35.000 000	Na	Na	Na	Na	34.679. 400	Na	Na	Na	Na	99,08	-	-
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	105.950 000	215.000 000	220.000 000	30.000 000	-	86.169 000	197.321 090	199.914 030	28.844 000	-	81,33	90,87	90,87	96,15	-71,68%	-66,53%
Program Penatagunaan Tanah	-	276.050 000	170.000 000	70.000 000	2.530 000.000	-	173.936 000	71.025 942	69.483. 444	2.401. 137.520	-	63,01	99,26	99,26	94,91	816,50%	1280,47%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15.344.180 000	-	-	-	-	15.683 828.580	-	-	-	-	98,37	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	357.330. 000	-	-	-	-	310.732 000	-	-	-	-	86,96	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	111.337. 500	-	-	-	-	34.810 930	-	-	-	-	31,10	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Program	Anggaran Tahun Ke (Rp. 000)					Realisasi Anggaran Tahun Ke (Rp. 000)					Rasio Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Capaian Kinerja Keuangan																	
Program Peningkatan Perencanaan Dan Penganggaran Skpd	53.300.000	-	-	-	-	4.199.000	-	-	-	-	7,88	-	-	-	-	-	-
Program Lingkungan Sehat Perumahan	108.600.000	-	-	-	-	97.089 800	-	-	-	-	89,40	-	-	-	-	-	-
Program Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan	641.758.500	-	-	-	-	440.058 865	-	-	-	-	68,57	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.1.5.Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Perumahan Kabupaten Pemalang adalah seluruh masyarakat yang terkait dengan bidang perhubungan, termasuk pengguna jalan, penumpang angkutan umum, pemilik kendaraan bermotor, pengembang perumahan dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam urusan bidang perhubungan serta bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan. Ini termasuk pemilik rumah, masyarakat yang terkena dampak rekolasi program pemerintah, korban bencana, dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman.

Secara lebih rinci, kelompok sasaran layanan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pengguna Jalan (Kendaraan bermotor dan Kendaraan tidak bermotor)
   Pengguna jalan adalah sasaran utama dalam hal keselamatan, kelancaran, ketertiban, dan kenyamanan lalu lintas.
2. Penumpang Angkutan Umum
   Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki tanggung jawab dalam memastikan keamanan, kenyamanan, dan efisiensi transportasi publik.
3. Pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji
   Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman bertanggung jawab atas uji KIR (Kelaikan Kendaraan), perizinan angkutan umum, dan sebagainya.
4. Penyedia Jasa Perhubungan:
   Layanan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman juga mencakup penyediaan jasa seperti penerbitan izin trayek, izin angkutan tidak dalam trayek, dan izin insidentil.
5. Pihak yang terkait dengan perhubungan
   Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman juga melayani pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam bidang perhubungan, seperti organda, Koperasi Angkutan, pengelola terminal, pengelola parkir, dan lain-lain.
6. Pihak yang terkait dengan penggunaan ruang lalu lintas
   Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman juga melayani pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam penggunaan ruang lalu lintas untuk sektor lain seperti industri, pertokoan, dan lain-lain dalam bentuk penerbitan rekomendasi Andalalin.
7. Pemilik rumah:
   Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman berperan dalam menyusun kebijakan, regulasi, dan program terkait perumahan, termasuk rumah subsidi, rumah swadaya, dan perbaikan rumah kumuh.
8. Pengembang perumahan:
   Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan izin, pengawasan, dan bimbingan teknis terkait pengembangan perumahan.
9. Masyarakat yang membutuhkan infrastruktur:
   Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman bertanggung jawab atas pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

https://jdih.pemalangkab.go.id

10. Masyarakat yang membutuhkan utilitas umum:
    Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman memastikan ketersediaan dan kelancaran layanan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman.
11. Masyarakat yang terkena dampak bencana:
    Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman berperan dalam menyediakan dan merehabilitasi rumah korban bencana.
12. Masyarakat yang terkena dampak relokasi:
    Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman berperan dalam memfasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah
13. Masyarakat yang membutuhkan pertamanan dan pemakaman:
    Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki peran dalam pengelolaan dan pengembangan area pertamanan dan pemakaman.
14. Masyarakat yang membutuhkan layanan informasi publik:
    Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman menyediakan informasi publik terkait perumahan dan kawasan permukiman.

2.1.6. Mitra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang

Mitra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang adalah berbagai pihak yang bekerja sama dengan dinas untuk mencapai tujuan bersama, seperti melaksanakan program, kegiatan, atau kebijakan di bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan. Mitra Kerja Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang adalah :

1. Kepolisian
   Kerja sama antara Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kepolisian melibatkan berbagai bentuk, termasuk kegiatan bersama, koordinasi, dan saling memberikan dukungan. Bentuk kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas, efektivitas pengaturan lalu lintas, dan penegakan hukum di bidang transportasi.
2. Kementerian Perhubungan
   Kerja sama antara Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat berupa koordinasi, kolaborasi, dan pertukaran informasi untuk mewujudkan transportasi yang lebih baik. Beberapa bentuk kerjasama meliputi penyesuaian kebijakan dan regulasi, peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan keselamatan lalu lintas, serta pengembangan teknologi transportasi.
3. PT. KAI Persero
   Kerjasama antara Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan PT. KAI Persero mencakup pengelolaan perlintasan kereta api sebidang termasuk pemasangan palang pintu dan pos jaga untuk meningkatkan keselamatan.
4. Jasa Raharja
   Kerjasama antara Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Jasa Raharja berfokus pada peningkatan keselamatan

https://jdih.pemalangkab.go.id

lalu lintas dan perlindungan bagi pengguna transportasi seperti sosialisasi keselamatan.

5. Organda
   Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pembinaan transportasi, serta Organda sebagai wadah pengusaha angkutan, perlu bersinergi untuk mencapai tujuan bersama, seperti meningkatkan keselamatan, kelancaran, dan kenyamanan lalu lintas. Dishub berperan dalam memberikan pembinaan dan bimbingan kepada pengusaha angkutan, sementara Organda berperan dalam menyalurkan aspirasi dan kepentingan anggotanya, serta membantu Dishub dalam melaksanakan kebijakan terkait transportasi seperti penanganan pelanggaran ODOL (Over Dimension Over Loading), peningkatan keselamatan lalu lintas maupun penyelenggaraan angkutan Lebaran.
6. Kementerian Pekerjaan Umum
   Hubungan kemitraan ini dalam konteks pembangunan dan pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman. Kementerian PU memiliki peran strategis dalam perencanaan, pembangunan, dan pembinaan infrastruktur yang mendukung kawasan permukiman, sementara Disperkim bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program perumahan dan permukiman di wilayahnya.
7. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
   Hubungan kemitraan ini dalam bentuk KemenPera bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, serta memberikan dukungan dan bimbingan teknis kepada Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugasnya di daerah.
8. Kontraktor
   Hubungan kemitraan ini dalam hal pelaksanaan kegiatan konstruksi fisik sesuai dengan rencana dan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh dinas. Mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek-proyek pembangunan atau perbaikan perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2.1.7.Kerjasama Daerah

Kerja sama daerah adalah usaha bersama antara dua daerah atau lebih, atau antara daerah dengan pihak ketiga, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif. Adapun sumber pembiayaan kerjasama daerah dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pihak ketiga, Sumber pembiayaan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah.

Kerjasama daerah juga bisa dilakukan dengan mekanisme KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), kerjasama ini untuk menyediakan infrastruktur publik melalui kolaborasi antara pemerintah dan pihak ketiga.

https://jdih.pemalangkab.go.id

KPBU merupakan skema yang bertujuan mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah dalam membangun infrastruktur dengan memanfaatkan sumber daya dari badan usaha dari pihak ketiga.

Salah satu kerjasama daerah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang yaitu dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dalam Penyediaan Layanan Perbankan Secara Online Dalam pembayaran Retribusi Parkir dan Terminal di Kabupaten Pemalang. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi :

a. Pelayanan pengelolaan retribusi parkir dan terminal
b. Pemanfaatan bersama berupa fasilitas, sarana prasarana dan informasi teknologi yang dimiliki para pihak.

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025. Kerjasama ini dapat diperpanjang mengingat layanan perbankan secara online dapat memudahkan masyarakat dalam pembayaran retribusi parkir dan terminal.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1.Permasalahan

Rumusan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan salah satu bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan bidang perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman. Rumusan permasalahan yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan bidang perhubungan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan sebagai berikut :

Tabel 2.24.
Rumusan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Pemalang

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat	Rendahnya kompetensi Sumberdaya Manusia	Kurangnya pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pegawai
		Sarana prasarana yang terbatas dalam rangka pelayanan masyarakat dan mendukung tugas-tugas internal	Kurangnya sarana mobilitas dan sistem IT yang memadai untuk menunjang kegiatan operasional
2	Belum optimalnya konektivitas antar wilayah	Berkurangnya jumlah armada yang melayani wilayah Kabupaten Pemalang	Beralihnya pilihan moda transportasi masyarakat dari penggunaan transportasi umum menjadi transportasi pribadi
			Banyaknya kendaraan bermotor angkutan umum dalam trayek yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal angkutan orang

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			Belum tersedianya angkutan umum masal
		Belum optimalnya penataan terminal C di Kabupaten Pemalang	Standar Pelayanan Minimal terminal yang belum optimal dipenuhi
3	Belum optimalnya kinerja jalan	Belum adanya database perlengkapan jalan yang up to date dan valid	Banyaknya rambu-rambu lalu lintas yang rusak/hilang
		Masih tingginya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas jalan	Kesadaran masyarakat berlalu lintas yang rendah
			Belum semua perlintasan sebidang berpalang pintu
			Belum optimalnya penindakan dan penertiban kendaraan ODOL
		Masih kurangnya database atau kajian potensi parkir	Belum semua juru parkir terdaftar
			Kurangnya sosialisasi dan pelatihan bagi juru parkir
		Banyaknya kendaraan bermotor wajib uji yang tidak melakukan uji berkala	Kurangnya pengawasan kendaraan wajib uji
			Kurangnya sosialisasi bagi pemilik kendaraan wajib uji
4	Masih tingginya backlog rumah dan rumah tidak layak huni	Masih rendahnya ketersediaan rumah layak huni bagi MBR	Data backlog rumah belum terupdate secara berkala
			Kurangnya akses perumahan bagi MBR terhadap rumah yang layak dan terjangkau
			Kurangnya jumlah unit rusunawa yang layak huni
5	Masih tingginya ancaman bencana	Masih kurang optimalnya penyediaan rumah bagi korban bencana alam dan terdampak program pemerintah	Terbatasnya ketersediaan lahan pengganti dalam penyediaan rumah bagi korban bencana alam dan terdampak program pemerintah
6	Kurang optimalnya penyediaan PSU perumahan	Kurang lengkapnya penyediaan prasarana dan sarana utilitas umum (PSU) perumahan	Database PSU perumahan belum terupdate secara berkala
			Pembinaan dan pengawasan penyediaan PSU bagi pengembang perumahan
			Belum optimalnya pembangunan dan pemeliharaan PSU perumahan
			Belum optimalnya sinkronisasi dan koordinasi antara stakeholder dalam penyediaan PSU

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			Masih rendahnya kesadaran masyarakat menjaga dan memelihara prasarana dan sarana utilitas umum (PSU)
7	Kurang optimalnya sertifikasi dan registrasi bagi pengembang perumahan	Belum terpenuhinya Standar Operasional Prosedur perizinan pengembangan perumahan	Kurangnya kesadaran pengembangan untuk memenuhi persyaratan perizinan pengembangan perumahan
			Belum optimalnya sinkronisasi dan koordinasi antar Perangkat Daerah, antar sektor dan antar lembaga dalam kewenangannya menerbitkan sertifikasi dan registrasi bagi pengembang perumahan
8	Masih adanya sengketa pertanahan	Belum optimalnya penyelesaian konflik pertanahan	Database pertanahan belum terupdate secara berkala
			Belum optimalnya Standar Operasional Prosedur administrasi pertanahan di tingkat desa/kelurahan
9	Belum optimalnya pembangunan kawasan permukiman berkelanjutan	Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh	Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan trend urbanisasi
			Kurangnya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman
			Keterbatasan ketersediaan lahan untuk membangun sarana dan prasarana penanganan permukiman kumuh
			Kurangnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan sehat
			Kurangnya koordinasi program antar instansi atau lembaga dalam penanganan kawasan kumuh
10	Belum optimalnya pembangunan dan penataan Ruang Tebuka Hijau taman	Masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau taman di tingkat Ibukota Kecamatan	Kurangnya pembangunan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau taman
			Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.2.2. Isu Strategis

2.2.2.1. Telaah Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan dan untuk mengidentifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Visi Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam RPJMD 2025-2029 yaitu :

"**PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA**"

Makna dari beberapa kata kunci pada pernyataan visi, sebagai berikut:

Bersih, Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan.

Cakap, dimaknai memiliki sumber daya manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.

Handal, dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislative bersama unsur masyarakatnya.

Mulya, Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan local sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religious.

Dalam mewujudkan Visi tersebut, terdapat 8 (delapan) Misi sebagai berikut:

MISI 1 “RESIK”

Menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih. Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik

MISI 2 “HIJAU”

Meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sektor unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau, yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan) yang ramah lingkungan, industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM di masyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.

MISI 3 “APIK”

Meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penataan wilayah dengan infrastruktur yang baik,

https://jdih.pemalangkab.go.id

pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dari Desa.

MISI 4 "PEDULI"

Meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakter, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi.

MISI 5 "SILATURAHMI"

Meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara gotong royong, dan saling menghormati dan teposliro.

MISI 6 "ORGANISATORIS"

Meningkatkan Pemerintah yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan Good Governance, Clean Governance dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.

MISI 7 "DIGITALISASI"

Memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi

MISI 8 "IKHLAS"

Menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, Bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkan kearifan dan budaya lokal.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 sebagai upaya dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang. Pelayanan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman dominan terdapat dalam tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan 2 : Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel dengan sasaran sebagai berikut :

   Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif ,efisien, dengan pelayanan publik yang baik.

   Pencapaian sasaran ini apabila dikaitkan dengan pelayanan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman diarahkan peningkatan akuntabilitas pembangunan melalui peningkatan kualitas perencanaan, kinerja dan pelaporan. Sasaran ini juga diarahkan untuk menciptakan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif, sehingga mempercepat keberhasilan reformasi birokrasi. Sementara peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkaitan dengan kelompok sasaran pelayanan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman seperti pengguna jalan, penumpang angkutan umum,

https://jdih.pemalangkab.go.id

pemilik kendaraan bermotor, penyedia jasa perhubungan dan pihak yang terkait dengan perhubungan, serta pelayanan pada bidang perumahan dan kawasan permukiman seperti pemilik rumah, pengembang perumahan, masyarakat yang membutuhkan infrastruktur dan fasilitas umum dan pihak yang terkait dengan pelayanan perhubungan, perumahan, kawasan dan pertanahan adalah dengan mengimplementasikan SOP dan SPP, mewujudkan pelayanan berbasis digital, mudah dan murah.

2. Tujuan 3 : Meningkatkan daya saing pembangunan daerah dengan sasaran sebagai berikut:
   Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata
   Pencapaian sasaran ini apabila dikaitkan dengan pelayanan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman diarahkan pada penyediaan konektivitas yang menghubungkan antar wilayah dan peningkatan keselamatan jalan serta penanganan kumuh dan penyediaan rumah layak huni sesuai standar pelayanan minimal pada korban bencana dan proyek.

Gambar 2.2.
Keterkaitan RPJMD Dengan Pelayanan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman

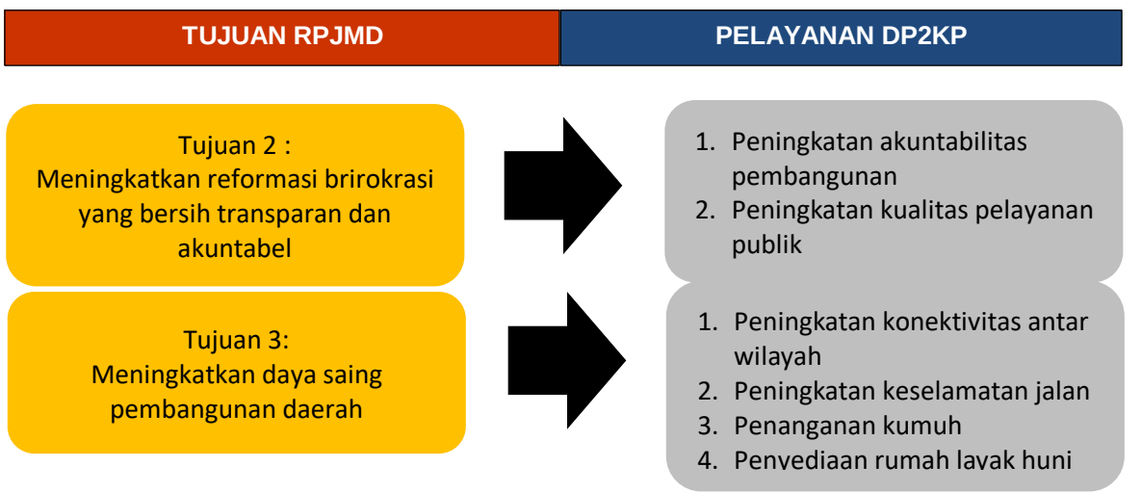

2.2.2.2. Telaah KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipasif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembanguan suatu wilayah dan /atau kebijakan, rencana dan/atau program.
Tujuan pembangunan berkelanjutan saat ini dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan kelanjutan *Millennium Development Goals* (MDGs). Komitmen Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan TPB/SDGs ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, membentuk Tim Koordinasi Nasional (TKN), menyusun roadmap 2015-2030, serta mengatur penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs. Penyusunan RAD TPB/SDGs di daerah menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk melaksanakan TPB/SDGs di daerah.

Berikut adalah ketujuh belas tujuan dalam TPB yang telah diturunkan dalam sasaran nasional.

Tujuan 1 : Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan 2 : Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
Tujuan 3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Tujuan ini untuk menjamin akses secara universal terhadap seluruh layanan kesehatan baik fisik maupun mental, dari berbagai ancaman penyakit menular maupun tidak menular.
Tujuan 4 : Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
Tujuan 5 : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan
Tujuan 6 : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang
Tujuan 7 : Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern
Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua.
Tujuan 9 : Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi
Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara
Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya.
Tujuan 14 : Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan Menyusun Tata Ruang Laut
Tujuan 15 : Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati.
Tujuan 16 : Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
Tujuan 17 : Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Selanjutnya Identifikasi terhadap indikator pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam rangka mendapatkan permasalahan dan isu strategis dilakukan dengan melihat capaian indikator setiap tujuan yang dikelompokkan dalam 4 pilar yaitu sosial, ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata kelola.
Dari 4 pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman hanya terdapat dalam pilar sebagai berikut :

1. Pilar Ekonomi
   Tujuan 9 yaitu Infrastruktur, industri dan inovasi, dimana tujuan ini diarahkan untuk meningkatan infrastruktur perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan yang mendukung industri.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2. Pilar Lingkungan
   Tujuan 11 yaitu kota dan permukiman berkelanjutan, dimana tujuan ini diarahkan mengurangi jumlah kerugian ekonomi dan orang terdampak bencana, serta isu lingkungan perkotaan (kemacetan dan polusi udara).

Berdasarkan telaah RPJMD Tahun 2025-2029 dan telaah KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 maka dapat dirumuskan isu strategis yang berkailan dengan pelayanan bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat pada masa yang akan datang. Beberapa kriteria yang digunakan untuk memilih isu strategis, yaitu :

1. Bersifat lintas sektor,
2. Bersifat lintas wilayah
3. Berupa fenomena atau persoalan nyata
4. Berdampak negatif jangka panjang jika tidak diselesaikan
5. Berpotensi mengganggu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan
6. Dampaknya kumulatif dan berefek ganda
7. Dampaknya lebih luas dari wilayah perencanaan.

Di samping itu, kondisi lingkungan eksternal, kebijakan pembangunan nasional, provinsi, rencana tata ruang, dan rencana pembangunan jangka panjang sebagaimana diuraikan di atas, merupakan referensi untuk memperkaya perumusan isu strategis. Selanjutnya dengan mendasari pada lingkup tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang dan melihat permasalahan yang ada serta dengan mempertimbangkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pemalang. Isu-isu Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dijelaskan sebagai berikut :

https://dishub.pemalangkab.go.id

Tabel 2.25.
Isu Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
• Sumberdaya manusia Dinas Perhubungan • Sarana dan prasarana Dinas Perhubungan	Belum optimalnya pelayanan publik	Membangun kelembagaan yang efektif	• Perubahan teknologi	• Perubahan teknologi • Pelatihan dan pengembangan SDM	• Perubahan teknologi • Pelatihan dan pengembangan SDM	• Masih rendahnya konektivitas antar wilayah • Belum optimalnya pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan yang berkualitas dan merata
• Kendaraan angkutan umum • Penumpang angkutan umum • Terminal	Belum optimalnya konektivitas antar wilayah	• Membangun infrastruktur yang tangguh • Menjadikan kota dan permukiman berkelanjutan	• Logistik dan efisiensi • Keamanan dan keselamatan	• Aksesibilitas wilayah 3T • Integrasi moda transportasi • Peningkatan kualitas infrastruktur • Peningkatan pelayanan transportasi umum	• Peningkatan kualitas infrastruktur • Peningkatan pelayanan transportasi umum • Peningkatan peran swasta dalam layanan transportasi	
• Pengaturan dan rekayasa lalu lintas	• Belum optimalnya kinerja jalan	• Membangun infrastruktur yang tangguh • Menjadikan Kota dan permukiman berkelanjutan	• Keamanan dan keselamatan • Kemacetan • Dampak lingkungan	• Keamanan dan keselamatan • Kemacetan • Dampak lingkungan	• Keamanan dan keselamatan • Kemacetan • Dampak lingkungan	
• Perumahan • Kawasan permukiman • Pertanahan	Masih tingginya backlog rumah dan rumah tidak layak huni	Mengurangi jumlah kerugian ekonomi dan orang terdampak bencana, serta isu lingkungan perkotaan	• Perumahan layak, terjangkau dan aman	• Demografi • Perumahan layak, terjangkau dan aman	• Demografi • Perumahan layak, terjangkau dan aman	
• Perumahan	Kurang optimalnya penyediaan PSU perumahan	Mengurangi jumlah kerugian ekonomi dan orang terdampak	• Ketersediaan PSU	• Ketersediaan PSU	• Ketersediaan PSU	

https://jdih.pemalangkab.go.id

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
• Kawasan permukiman • Pertanahan		bencana, serta isu lingkungan perkotaan	• Pengalih fungsian PSU	• Pengalih fungsian PSU	• Pengalih fungsian PSU	
• Perumahan • Kawasan permukiman • Pertanahan	Kurang optimalnya sertifikasi dan registrasi bagi pengembang perumahan	Mengurangi jumlah kerugian ekonomi dan orang terdampak bencana, serta isu lingkungan perkotaan	• Profesionalisme • Jaminan kualitas • Perlindungan konsumen	• Profesionalisme • Jaminan kualitas • Perlindungan konsumen	• Profesionalisme • Jaminan kualitas • Perlindungan konsumen	
• Perumahan • Kawasan permukiman • Pertanahan	Masih adanya sengketa pertanahan	Mengurangi jumlah kerugian ekonomi dan orang terdampak bencana, serta isu lingkungan perkotaan	• Perebutan tanah • Kepemilikan tanah	• Perebutan tanah • Kepemilikan tanah	• Perebutan tanah • Kepemilikan tanah	
• Perumahan • Kawasan permukiman • Pertanahan	Target universal kota dan permukiman yang berkelanjutan belum tercapai	Mengurangi jumlah kerugian ekonomi dan orang terdampak bencana, serta isu lingkungan perkotaan	• Perubahan iklim • Urbanisasi • Akses perumahan layak huni	• Perubahan iklim • Urbanisasi • Akses perumahan layak huni	• Perubahan iklim • Urbanisasi • Akses perumahan layak huni	
• mahan • Kawasan permukiman • Pertanahan	Belum optimalnya pembangunan dan penataan Ruang Tebuka Hijau taman	Mengurangi jumlah kerugian ekonomi dan orang terdampak bencana, serta isu lingkungan perkotaan	• Perubahan iklim • Kualitas udara	• Perubahan iklim • Kualitas udara	• Perubahan iklim • Kualitas udara • Aktivitas sosial masyarakat	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB 3
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DP2KP) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan tindak lanjut dari sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang dalam 5 tahun ke depan. Sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang merupakan tujuan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DP2KP) Kabupaten Pemalang yaitu **Meningkatnya Kinerja Transportasi dan Akses Hunian Layak yang Aman, Terjangkau, Berkelanjutan serta Pertanahan Berkeadilan**

Meningkatnya kinerja transportasi berarti meningkatkan kemampuan jalan untuk menampung lebih banyak kendaraan dalam satuan waktu tertentu melalui rekayasa lalu lintas, seperti pemasangan rambu-rambu, penataan jalur, dan pengaturan lampu lalu lintas, dapat meningkatkan efisiensi dan kapasitas.

Sedangkan meningkatnya Akses hunian Layak yang Aman Terjangkau dan Berkelanjutan serta Pertanahan Berkeadilan berarti meningkatkan penanganan kumuh dan penyediaan rumah layak huni sesuai standar pelayanan minimal pada korban bencana dan proyek untuk mendukung tujuan peningkatan daya saing daerah yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

3.2. Sasaran

Sasaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DP2KP) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah hasil penyelenggaraan pembangunan bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan. Berikut sasaran (DP2KP) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah

a. Meningkatnya Konektivitas Transportasi.
   Meningkatnya konektivitas Transportasi dilakukan untuk mendukung tujuan peningkatan daya saing daerah yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur transportasi yang baik akan meningkatkan konektivitas antar wilayah, mempermudah distribusi barang dan jasa, membuka peluang kerja, dan mendorong investasi.
b. Meningkatnya Akses Hunian Layak
   Meningkatnya rumah tangga dengan akses hunian layak berarti semakin banyak keluarga di Kabupaten Pemalang yang memiliki rumah atau tempat tinggal yang memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan. Ini mencakup kriteria seperti kecukupan luas tempat tinggal, akses air bersih, sanitasi yang layak, dan kondisi bangunan yang aman.
c. Terlaksananya Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum
   Meningkatnya penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum berarti semakin banyak tanah yang dialokasikan atau dibebaskan untuk pembangunan fasilitas publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

https://dishub.pemalangkab.go.id

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir Renstra
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Meningkatnya kinerha transportasi dan akses hunian layak yang aman, terjangkau, berkelanjutan serta pertanahan berkeadilan		VC Rasio	Jumlah volume lalu lintas/ kapasitas jalan	Rasio		0,38	0,36	0,36	0,34	0,34	0,33	0,34
			Luasan kawasan kumuh	Luasan wilayah yang ditandai dengan kondisi hunian dan prasarana yang tidak layak, seperti kepadatan tinggi, minimnya akses infrastruktur, dan lingkungan yang tidak sehat	Ha	198,258	197,758	197,258	196,758	196,258	195,758	195,258	195,758
			Backlog rumah	Backlog Rumah = Jumlah Rumah Tangga – Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Hunian Tetap	Unit	17.174	16.812	16.450	16.088	15.726	15.364	15.000	15.364
		Meningkatnya konektivitas transportasi	Rasio konektivitas	Rasio konektvitas Kabupaten atau Kota = (IK 1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) o IK1 (angkutan jalan) = (jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten/ kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/ kota tersebut)	%	71,42	71,72	72,02	72,32	72,62	72,92	73,22	72,92

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir Renstra
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya akses hunian layak	Rumah tangga dengan akses hunian layak		%	32,13	69,48	71,06	72,64	74,20	75,77	77,32	75,77
			Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni DIBAGI jumlah total unit rumah Kabupaten/ Kota DIKALI 100%	%	67,87	30,52	28,94	27,36	25,8	24,23	22,68	22,68
			Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kab/Kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) dibagi Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha x 100%	%	31,2	31,4	31,56	31,72	31,88	32,04	32,2	32,2
			Indeks pencapaian SPM PRKP	SPM yang tercapai dibagi total SPM yang ada dikali 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Terlaksananya penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum DIBAGI jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum DIKALI 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100

https://jdih.pemalangkab.go.id

3.3. Strategi

Strategi dalam bab ini dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yaitu Terwujudnya Pemalang Bercahaya, Bersih, Cakap, Handal dan Mulya dan merealisasikan salah satu tujuan daerah yaitu meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata. Dengan demikian strategi ini merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DP2KP) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Perumusan strategi Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DP2KP) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 didasarkan pada kriteria:

1. Strategi yang realistis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan
2. Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan
3. Mengevaluasi berbagai faktor internal (kekuatan dan kelemahan), eksternal (peluang dan tantangan) dalam upaya merumuskan strategi yang tepat.

Salah satu pendekatan yang dapat dipergunakan sebagai instrumen dalam pemilihan strategi di bidang perhubungan adalah melalui analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor internal dan eksternal dengan didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*).

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.2.
Analisis SWOT

ISU STRATEGIS	KEKUATAN (STRENGHT)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
	1. Ketersediaan sumberdaya manusia yang mendukung pelayanan bidang perhubungan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan 2. Transportasi darat sebagai andalan mobilitas orang dan barang di Kabupaten Pemalang 3. Tersebarnya terminal untuk mendukung fungsi pengaturan, pengawasan dan pengoperasian arus transportasi 4. Koordinasi antar instansi terkait dalam peningkatan pelayanan bidang perhubungan 5. Semakin besarnya kewenangan daerah untuk mengembangkan program Perumahan dan Permukiman 6. Potensi aset tanah daerah yang masih dapat digunakan dalam penyediaan PSU	1. Sarana prasarana yang terbatas dalam rangka pelayanan masyarakat dan mendukung tugas-tugas internal 2. Standar Pelayanan Minimal terminal yang belum optimal dipenuhi 3. Belum optimalnya penataan terminal C di Kabupaten Pemalang 4. Belum adanya database perlengkapan jalan yang up to date dan valid 5. Belum adanya database potensi titik parkir 6. Kurangnya tersedianya database perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang valid dan mutakhir 7. Masih rendahnya ketersediaan rumah layak huni bagi MBR 8. Kurangnya jumlah unit rusunawa yang layak huni 9. Kurangnya Pembinaan dan pengawasan penyediaan PSU bagi pengembang perumahan
PELUANG (OPPORTUNITY) 1. Program nasional dan provinsi yang mendukung konektivitas, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan di Kabupaten Pemalang. 2. Perkembangan teknologi yang mendukung efisiensi, transparansi, aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang perhubungan 3. Perkembangan teknologi yang mendukung efisiensi, transparansi, aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan 4. Sinkronisasi dan koordinasi antar Perangkat Daerah, antar sektor dan antar lembaga	**STRATEGI SO** 1. Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia 2. Pengembangan Standar Operasional Prosedur perizinan pengembangan perumahan	**STRATEGI WO** 1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan 2. Pengembangan database perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan

https://jdih.pemalangkab.go.id

dalam kewenangannya menerbitkan sertifikasi dan registrasi bagi pengembang perumahan		
TANTANGAN (THREAT) 1. Beralihnya pilihan moda transportasi masyarakat dari penggunaan transportasi umum menjadi transportasi pribadi 2. Banyaknya armada yang tidak laik jalan dan tidak adanya peremajaan armada angkutan umum 3. Masih tingginya pelanggaran lalu lintas jalan 4. Banyaknya kendaraan wajib uji yang tidak melaksanakan uji KIR kendaraan 5. Pemenuhan backlog perumahan sebagai dampak pertumbuhan penduduk 6. Terbatasnya ketersediaan lahan pengganti dalam penyediaan rumah bagi korban bencana alam dan terdampak program pemerintah 7. Belum optimalnya pembangunan dan pemeliharaan PSU perumahan 8. Masih rendahnya kesadaran masyarakat menjaga dan memelihara prasarana dan sarana utilitas umum (PSU)	**STRATEGI ST** 1. Pengawasan dan pembinaan kelompok sasaran pelayanan bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan 2. Pengembangan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)	**STRATEGI WT** 1. Optimalisasi jaringan transpotasi 2. Pengembangan rumah layak huni

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dari keempat strategi tersebut selanjutnya dilakukan penahapan Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DP2KP) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Penahapan pembangunan ini sangat penting karena memungkinkan pengelolaan sumber daya dan waktu secara efisien, mendukung koordinasi antar sektor, dan memastikan pencapaian tujuan pembangunan secara berkelanjutan. Penahapan juga memfasilitasi evaluasi dan penyesuaian rencana pembangunan bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan secara berkala, sehingga lebih fleksibel terhadap perubahan kondisi internal maupun eksternal.

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DP2KP) Kabupaten Pemalang. Penahapan Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DP2KP) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dapat dijadikan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.
Penahapan Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DP2KP) Kabupaten Pemalang

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pembangunan infrastruktur transportasi dan akses hunian layang yang aman, terjangkau serta pertanahan yang berkelanjutan	Penataan infrastruktur transportasi dan akses hunian layang yang aman, terjangkau serta pertanahan yang berkelanjutan	Peningkatan dan pembaharuan infrastruktur transportasi dan akses hunian layang yang aman, terjangkau serta pertanahan yang berkelanjutan	Terwujudnya penguatan fondasi transformasi infrastruktur transportasi dan akses hunian layang yang aman, terjangkau serta pertanahan yang berkelanjutan	Akselerasi transformasi infrastruktur transportasi dan akses hunian layang yang aman, terjangkau serta pertanahan yang berkelanjutan

Penjelasan penahapan Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DP2KP) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tahap I (Tahun 2026) :

Pembangunan infrastruktur transportasi dan akses hunian layang yang aman, terjangkau serta pertanahan yang berkelanjutan dilakukan dengan berbasis data yang valid dan up to date sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan efektivitas dan keberlanjutan infrastruktur di bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan.

Tahap II (Tahun 2027)

Penataan infrastruktur transportasi dan akses hunian layang yang aman, terjangkau serta pertanahan yang berkelanjutan dilakukan melalui tata kelola infrastruktur dengan mengembangkan SOP yang efektif dan efisien untuk menciptakan pertumbuhan dan daya saing wilayah.

Tahap III (Tahun 2028)

Peningkatan dan pembaharuan infrastruktur transportasi dan akses hunian layang yang aman, terjangkau serta pertanahan yang berkelanjutan dilakukan

https://jdih.pemalangkab.go.id

dengan pengembangan digitalisasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat. Langkah ini melibatkan penerapan teknologi digital pada berbagai aspek, mulai dari pembayaran transportasi hingga pengelolaan lalu lintas, pemetaan, pengelolaan, hingga pelayanan terkait perumahan dan permukiman serta pertanahan.

Tahap IV (Tahun 2029)

Tahap IV tahun 2029 merupakan tahap terakhir dari Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Periode 2025-2029 dimana pada tahap ini telah terwujud penguatan fondasi transformasi infrastruktur transportasi dan akses hunian layang yang aman, terjangkau serta pertanahan yang berkelanjutan.

Tahap V (Tahun 2030)

Tahap V tahun 2030 merupakan awal tahun dimulainya Tahap II RPJPD tahun 2030-2034 yaitu dengan dimulainya akselerasi transformasi infrastruktur transportasi dan akses hunian layang yang aman, terjangkau serta pertanahan yang berkelanjutan. Akselerasi transformasi ini adalah dengan menjaga momentum pembangunan guna memastikan kesinambungan dan efektivitas pembangunan infrastruktur transportasi dan akses hunian layang yang aman, terjangkau serta pertanahan yang berkelanjutan.

4.4. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DP2KP) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DP2KP) Kabupaten Pemalang serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra

Tabel 3.4.
Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DP2KP	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		1. Peningkatan kualitas dan profesionalisme pegawai	Strategi : Peningkatan kualitas sumberdaya manusia Arah Kebijakan : 1. Pendidikan dan pelatihan SDM	
		Penguatan manajemen resiko, digitalisasi, serta evaluasi berkelanjutan	Strategi : Pengembangan Standar Operasional Prosedur perizinan pengembangan perumahan Arah Kebijakan : Pendidikan dan pelatihan SDM Pengembangan digitalisasi perizinan pengembangan perumahan Peningkatan koordinasi antar instansi	
		1. Penyediaan konektivitas yang menghubungkan antar wilayah 2. Peningkatan keselamatan jalan	Strategi : Peningkatan sarana prasarana pelayanan bidang perhubungan Arah Kebijakan : 1. Penyediaan dan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DP2KP	KET.
			pemeliharaan perlengkapan jalan 2. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas terminal tipe C 3. Pengembangan digitalisasi pelayanan bidang perhubungan	
		1. Peningkatan kualitas perencanaan, kinerja dan pelaporan	Strategi : Pengembangan database perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan Arah Kebijakan : 1. Penyediaan database perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan 2. Pemetaan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	
		1. Penyediaan konektivitas yang menghubungkan antar wilayah 2. Peningkatan keselamatan jalan	Strategi : Pengawasan dan pembinaan kelompok sasaran pelayanan bidang perhubungan Arah Kebijakan : 1. Pembinaan dan pengawasan kendaraan 2. Pembinaan dan sosialisasi keselamatan berlalulintas	
		1. Menerapkan penghijauan dan tata kota berkelanjutan Pemenuhan ruang terbuka hijau	Strategi : Pengembangan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) Arah Kebijakan : Penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman Penyediaan ruang terbuka hijau	
		1. Penyediaan konektivitas yang menghubungkan antar wilayah 2. Peningkatan keselamatan jalan	Strategi : Optimalisasi jaringan transportasi Arah Kebijakan : 1. Optimalisasi jalur trayek angkutan umum	
		1. Penanganan kumuh dan penyediaan rumah layak huni sesuai standar pelayanan minimal pada korban bencana dan proyek	Strategi : Pengembangan rumah layak huni Arah Kebijakan : Peningkatan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap rumah layak huni Penyediaan rumah layak huni korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB 4
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang dalam mewujudkan sasaran jangka menengah, telah menetapkan rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025-2029. Sementara itu program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu pijakan penyusunan Renja Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2030.

Rencana program, kegiatan dan subkegiatan dalam Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Pemalang yang diambil dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan pencapaian tujuan pembangunan bidang urusan Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang.

Program yang ditetapkan merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.1.
Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan
Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang

Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
	Meningkatnya kinerja transportasi dan akses hunian layak yang aman dan terjangkau serta pertanahan berkeadilan				VC Rasio Luasan Kawasan Kumuh Backlog Rumah		
		Meningkatnya Konektivitas Transportasi			Rasio konektivitas		
		Meningkatnya Akses Hunian Layak			Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak		
					Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)		
					Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha di Kab/Kota yang ditangani		
					Indeks Pencapaian SPM PRKP		
		Meningkatnya penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum			Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		
			Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota		Nilai IKM Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Persentase terlaksananya Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	
					Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
					Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perseorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	

https://dishub.pemalangkab.go.id

Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
					Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga	Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan		**Persentase meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	
				Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	**Persentase terlaksananya Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota**	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	
					Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
					Jumlah evaluasi (Review) rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/ kota	Penetapan dan sosiaisasi rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/ kota	
					Jumlah dokumen penetaoan rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/ kota	Pelaksanaan penyusunan rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/ kota	
					Jumlah evaluasi (review) rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/ kota	Pelaksanaan evaluasi (Review) rencana aksi keselmatan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/ kota	
					Jumlah evaluasi (Review) pelaksanaan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/ kota	Pelaksanaan evaluasi (Review) rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/ kota	
				Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	**Persentase terlaksananya Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota**	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	
					Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
					Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
				Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	**Persentase terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
					Tersusunnya rencana pembangunan terminal penumpang tipe C	Penyusunan rencana pembangunan terminal penumpang tipe C	
					Jumlag terminal penumpang tipe C yang diawasi	Pengawasan operasional terminal penumpang tipe C	
					Jumlah terminal yang direvitalisasi (fasilitas utama dan penunjang)	Revitalisasi terminal tipe C (Fasilitas utama dan penunjang)	
					Jumlah system informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe C baik secara manual dan digital	Penyediaan system informasi manajemen terminal penumpang tipe C	
					Jumlah terminal tipe C yang terbangun yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Pembangunan terminal penumpang tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	
					Jumlah kebutuhan kompetensi sumber daya manusia pengelola terminal tipe C yang terpenuhi	Peningkatan kapasitas kompetensi SDM pengelola terminal penumpang tipe C	
					Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung)	
				Kegiatan Penerbitan izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	**Persentase terlaksananya Kegiatan Penerbitan izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	
					Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parker kewenangan kabupaten/ kota dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parker kewenangan kabupaten/ kota dalam system pelayanan perizinan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
						berusaha terintegrasi secara elektronik	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**Persentase terlaksananya Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya	Penigkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pengujian berkala kendaraan bermotor	
					Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar	Registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor	
					Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah laporan identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji	Identifikasi dan analisis potensi jumllah kendaraan bermotor wajib uji	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
					Jumlah laporan koordunasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	
					Jumlah laporan penetapan tariff retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor	Penetapan tariff retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor	
					Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	
				Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	**Persentase terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota**	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	
					Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah sertifikat system manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum	Penilaian pemenuhan dan penerbitan sertifikat system manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum	
					Jumlah ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan	Monitoring dan evaluasi implementasi batas kecepatan	
					Jumlah kawasan pembangunan rute aman selamat sekolah yang terbangun	Pembangunan rute aman selamat sekolah (RASS)	
					Jumlah lokasi rute aman sekolah (RASS) yang diidentifikasi dan diawasi	Monitoring dan evaluasi rute aman selamat sekolah (RASS)	
					Jumlah lokasi zona selamat sekolah (ZoSS) yang diidentisikasi dan diawasi	Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
					Jumlah penilai system manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum yang ditingkatkan kapasitasnya	Peningkatan kompetensi penilai system manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum	
					Jumlah ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan	Pembangunan implementasi batas kecepatan	
					Jumlah terbangunnya zona selamat sekolah (ZoSS)	Pembangunan zona selamat sekolah (ZOSS)	
					Jumlah laporan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/ kota	Sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu linyas untuk jaringan jalan kabupaten/ kota	
					Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu linyas yang dilaksanakan pengadaan dan pemasangan	Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	
					Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					jumlah pengadaan dan pemasangan system manajemen transportasi cerdas	Penyelenggaraan system manajemen transportasi cerdas	
				Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	**Persentase terlaksananya Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota**	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	
					Jumlah lapran koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	Koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
					Jumlah penilai andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	Peningkatan kompetensi penilai andalalin	
					Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	
					Jumlah persetujuan dokumen teknis andalalin yang ditetapkan	Penetapan dokumen teknis andalalin	
				Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	**Persentase terlaksananya Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	
					Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan terminal	Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terminal	
					Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan	Pelaksanaan inspeksi keselamatan angkutan pada terminal tipe C	
					Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan system manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum	Pelaksanaan Inspeksi, audit dan pemantauan system manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum	
					Jumlah auditor dan inspector lalu lintas dan angkutan jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	Peningkatan kapasitas auditor dan inspector lalu lintas dan angkutan jalan	
					Jumlah laporan uji perik terhadap unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor	Pelaksanaan pengawasan melalui uji petik terhadap unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
						uji berkala kendaraan bermotor	
				Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase terlaksananya Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota**	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	
					Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
					Jumlah armada angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kta yang tersedia	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	
				Kegiatan penetapan Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	**Persentase terlaksananya Kegiatan penetapan Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/ kota**	**Penetapan kawasan Perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/ kota**	
					Jumlah dokumen kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan kabupaten/ kota	Perumusan kebijakan penetapan kawasan perktaan untuk angkutan perkotaan kewenangan kabupaten/ kota	
					Jumlah dokumen sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan kabupaten/ kota	Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
						perkotaan kewenangan kabupaten/ kota	
				Kegiatan Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	**Persentase terlaksananya Kegiatan Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota**	**Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota**	
					Jumlah dokumen kebijakan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	
					Jumlah dokumen penetapan kebijakan dan tersosialisasinya rencana umum ajringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kta	
					Jumlah dokumen kebijakan pengendaluan pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Pengendalian pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	
				Kegiatan Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	**Persentase terlaksananya Kegiatan Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota**	**Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota**	
					Jumlah dokumen kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/ kota	Perumusan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/ kota	
					Jumlah dokumen sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/ kota	Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencana umum jaringan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
						trayek pedesaan kewenangan kabupaten/ kota	
				Kegiatan Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	**Persentase terlaksananya Kegiatan Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota**	**Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota**	
					Jumlah dokumen kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten/ kota	Perumusan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten/ kota	
					Jumlah dokumen sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah perasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten/ kota	Sosialisdasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah perasi angkutan orangn dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten/ kota	
					Jumlah laporan pelaksanaan ssialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan sewa khusus dalam kawasana perktaan kewenangan kabupaten/ kota	Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan sewa khusus dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten/ kota	
					Jumlah dokumen kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan sewa khusus dalam kawasan	Perumusan kebijakan penetapan wilayah oeprasi angkutan sewa khusus	

https://dishub.pemalangkab.go.id

Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
					perkotaan kewenangan kabupaten/ kota	dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten/ kota	
				Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase terlaksananya Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Kegiatan Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	**Persentase terlaksananya Kegiatan Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota**	**Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota**	
					Jumlah persetujuan izin angkutan taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan kabupaten/ kota dalam system	Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan taksi tidak dalam trayek	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
					pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang telah emmenuhi pesyaratan	sesuai wilayah kerja kewenangan kabupaten/ kota dalam system pelaynanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	
					Jumlah lapran koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyekenggaraan angkutan taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan kabupaten/ kota	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah perasi kwenangan kabupaten/ kota	
				Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase terlaksananya Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	
					Jumlah dokumen analisis tariff kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Analisis tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan d alam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	
					Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tariff kelas ekonomu angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Pengendalian dan pengawasan tariff kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan	

https://dishub.pemalangkab.go.id

Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
						perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	
			Terwujudnya Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota		**Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota**	**Program Pengembangan Perumahan**	
					Persentase Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota		
				Kegiatan Pendataan Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota	**Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota**	**Pendataan Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota**	
					Jumlah dokumen data identifikasi lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	
					Jumlah dokumen data rumah korban bencana kabupaten/ kota kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	
					Jumlah dokumen data rumah yang terkena bencana kabupaten/ kota berdasarkan tingkat kerusakan rumah	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah akibat bencana	
					Jumlah dokumen data rumah sewa milik masyarakat, rumah susun, dan rumah khusus	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	
					Jumlah dokumen data rumah di lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/ kota	Identifikasi perumahan di lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/ kota	
					Jumlah dokumen data bakal calon penerima rumah bagi masyarakat	Pendataan dan verifikasi calon penerima rumah bagi	

https://dishub.pemalangkab.go.id

Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
					yang terkena relokasi program kabupaten/ kota yang terverifikasi	masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten	
					Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana kabupaten/ kota	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana kabupaten/ kota	
					Jumlah dokumen data bakal calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/ kota yang terverifikasi	Pendataan dan verifikasi valon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/ kota	
				Kegiatan Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota	**Persentase terlaksananya kegiatan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota**	**Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota**	
					Jumlah orang/ sukarelawan yang mengikuti sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/ kota	Sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana	
					Jumlah orang pada tim satgas, tim pendamping, dan fasilitator yang terbentuk dan terlatih	Pembentukan dan pelatihan tim satgas, tim pendamping dan fasilitator	
					Jumlah dokumen data penerima bantuan berdasarkan jenis layanan	Koordinasi untuk menyepakatin penerima dan jenis pelayanan	
					Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan calon penerima rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/ kota	Rembug warga untuk menentujan calon penerima rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/ kota	
					Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan calon penerima rumah	Rembug warga untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/ kota	

https://dishub.pemalangkab.go.id

Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
					bagi korban bencana kabupaten/ kota		
					Jumlah orang yang mmengikuti sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses pembiayaan perumahan	Sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses pembiayaan perumahan	
					Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi tentang mekanisme penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan	Sosialisasi tentang mekanisme penggantian ja katas tanah dan/atau bangunan	
				Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota	**Persentase terlaksananya Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota**	**Bangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota**	
					Jumlah rumah korban bencana kabupaten/ kota	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	
					Jumlah rumah bagi korban bencana kabupaten/ kota yang terbangun	Pembangunan rumah bagi korban bencana	
					Jumlah rumah pada lokasi relokasi program kabupaten/ kota yang dilaksanakan operasional dan pemeliharaan	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten/ kota	
					Jumlah rumah tangga bagi korban bencana kabupaten/ kota yang mendapatkan fasilitas penyediaan rumah	Fasilitas penyediaan rumah bagi korban bencana kabupaten/ kota	
					Jumlah rumah tangga yang terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/ kota yang mendapatkan fasilitas penyediaan rumah	Fasilitas penyediaan rumah bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/ kota	
					Jumlah rumah bagi masyarakat yang terdampak relokasi program kabupaten/ kota	Pembangunan rumah bagi masyrakat yang terdampak	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
						relokasi program kabupaten/ kota	
					Jumlah rumah pada perumahan bagi korban bencana kabupaten/ kota yang dilaksanakan operasional dan pemeliharaan	Operasional dan pemelihataan lingkungan perumahan bagi korban bencana kabupaten/ kota	
					Kimlah rumah khusus beserta PSU bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/ kota	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/ kota	
					Jumlah rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana kabupaten/ kota	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana kabupaten/ kota	
				Kegiatan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota	**Persentase terlaksananya kegiatan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota**	**Pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota**	
					Jumlah rumah tangga terkena relokasi program kabupaten/ kota yang mendapatkan fasilitas bantuan penyediaan rumah	Pelaksanaan pembagian rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/ kota	
					Jumlah dokumen serah terima rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/ kota	Penatausahaan serah terima rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/ kota	
					Jumlah dokumen serah terima rumah bagi korban bencana kabupaten/ kota	Penatausahaan serah terima rumah bagi korban bencana kabuapten/ kota	
					Jumlah rumah tangga terdampak bencana kabupaten/ kota yang mendapatkan fasilitasi bantunan penyediaan rumah	Pelaksanaan pembagian rumah bagi korban bencana kabupaten/ kota	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
				Kegiatan pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	**Persentase terlaksananya kegiatan pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus**	**Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus**	
					Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/ penghuni rumah susun	Fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/ penghuni rumah susun	
					Jumlah dokumen pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	Penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	
					Jumlah rumah khusus yang dibangun	Pembangunan rumah khusus	
					Jumlah dokumen Hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penjualan rumah	Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penjualan rumah	
				Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan pengembangan perumahan	**Persentase terlaksananya kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan pengembangan perumahan**	**Penerbitan Izin Pembangunan dan pengembangan perumahan**	
					Jumlah dokumen kesepakatan dengan pengembang/ Pelaku pembangunan rumah untuk penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik	Fasilitas pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik	
					Jumlah pegawai BLU/BUMD yang mengikuti penguatan dan pembinaan untuk penyelenggaraan rumah sederhana	Penguatan dan pembinaan kepada BLU/BUMD untuk penyelenggaraan rumah sederhana	
					Jumlah laporan hasil koordiansi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	Koordinasi dan sinkronisasi pengendaliian pembangunan dan pengembangan perumahan	
					Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pemerintah	Koordinasi dan sinkronsisasi kerja sama pemerintah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
					daerah dengan badan usaha (KPDBU) perumahan umum/ Rumah susun Umum	daerah dengan badan usaha (KPDBU) perumahan umum/ rumah susun umum	
					Jumlah system layanan informasi dan komunikasi bidang perumahan dan kawasan permukiman yang terbangun/ terpelihara	Pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan system layanan informasi dan komunikasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	
					Jumlah dokumen rencana tapak dan lantai perumahan yang diselaraskan	Fasilitasi pemenuhan kesesuaian rencana tapak dan lantai perumahan	
				Kegiatan Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB)	**Persentase terlaksananya kegiatan Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB)**	**Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB)**	
					Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG)	Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG)	
			Terwujudnya kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani		**Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani**	**Program Kawasan Permukiman**	
				Kegiatan Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	**Jumlah Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman**	**Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman**	
					Jumlah dokumen kesepakatan dengan pengembang/ pelaku pembangunan rumahh untuk penerbitan izin pembangunan dan pengemabngan kawasan	Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan	

https://dishub.pemalangkab.go.id

Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
					permukiman terintegrasi secara elektronik	permukiman terintegrasi secara elektronik	
					Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kawasan permukiman	
				Kegiatan Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	**Persentase terlaksananya kegiatan Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha**	
					Jumlah dokumen kebijakan bidang PKP yang tersusun/ tereview/ Terlegalisasi	Penyusunan/ review/ legalisasi kebijakan bidang PKP	
					Jumlah dokumen serah terima rumah baru layak huni bagi masyarakat di kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Penatausahaan serah terima rumah baru layak huni bagi masyarakat di kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	
					Jumlah rumah tangga terdampak peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luasan di bawah 10 Ha	Pelaksanaan pembagian rumah bagi masyarakat untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luasan di bawah 10 (sepuluh) Ha	
					Jumlah kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh yang dibentuk/ dibina	Pembentukan/ pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh	
					Jumlah dokumen serah terima rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/ peremajaan/ permukiman kembali kawasan permukiman kumuh	Penatausahaan serah terima rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/ peremajaan/ permukiman kembali	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
						kawasan permukiman kumuh	
					Jumlah dokumenn hasil survei dan penatapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh	Survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh	
					Jumlah rumah tangga yang terfasilitasi peningkatan kesadaran dakam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hokum tentang kepemilikan rumah	Peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hokum tentang kepemilikan rumah	
				Kegiatan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	**Persentase terlaksananya kegiatan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha**	
					Jumlah rumah tidak llayak huni yang diperbaikan	Perbaikan rumah tidak layak huni	
					Jumlah dokumen kesepakatan kerja sama dalam perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU	Kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU	
					Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh	Koordinasi dan sinkronsisasi pengendaliasn penyelenggaraan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh	
					Jumlah dokumen data permukiman kumuh yang terverifikasi	Pendataan dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh	
					Luas kawasan permukiman kumuh yang diremajakan	Pelaksanaan peremajaan kawasan permukiman kumuh	
					Jumlah rumah tangga yang mendapatkan gasilitas penyediaan perumahan sementara bagi masyarakat yang terkena program	Fasilitasi penyediaan perumahan sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
					peremajaan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	
					Luas kawasan permukiman kumuh yang dimukimkan kembali	Pelaksanaan pemukiman kembali kawasan permukiman kumuh	
					Jumlah rumah baru layak huni yang dibangun untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Pembangunan rumah baru layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	
					Luas permukiman kumuh yang dipugar	Pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh	
			Terwujudnya Rumah Tidak Layak Huni Yang ditangani		**Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang ditangani**	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**	
					Meningkatnya Kesadaran Publik dalam Rangka Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh		
				Kegiatan Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/ kota	**Persentase terlaksananya kegiatan Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/ kota**	**Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/ kota**	
					Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	

https://dishub.pemalangkab.go.id

Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
					Jumlah rumah baru layak huni yag dibagun dalam rangka pencegahan kumuh	Pembangunan rumah batu layak huni dalam rangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru	
					Jumlah dokumen serah terima rumah baru layak huni bagi masyarakat untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh	Penatausahaan serah terima rumah baru layak huni bagi masyarakat untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya oermukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh	
					Jumlah rumah tangga yang mendapatkan fasilitasi bantuan penyediaan rumah untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh	Pelaksanaan pembaguan rumah baru layak huni bagi masyarakat untuk encegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh	
					Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendaluan dalam rangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru	Pengawasan dan pengdendalian dalam tangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru	
					Jumlah orang yang mengikuti penyadaran public pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	Penyadaram public pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	
					Jumlah orang yang mengikuti pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan terhadap kumuh	Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan terhadap kumuh dan	

https://dishub.pemalangkab.go.id

Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
					dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru	berkembangnya perumahan kumuh dan permukimann kumuh baru	
			Terwujudnya perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		**Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)**	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**	
				Kegiatan Penyelenggaraan PSU perumahan	**Persentase terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan PSU perumahan**	**Urusan Penyelenggaraan PSU perumahan**	
					Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU perumahan	Perencanaan penyediaan PSU perumahan	
					Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	
					Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan	Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	
					Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur dan kriteria serah terima (PSU)	Sosialisasi standar, prosedut dan kriteria serah terima PSU	
					Jumlah lokasi PSU perumahan yang dilaksanakan perbaikan	Perbaikan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	
					Jumlah lokasi pada perumahan yang dilaksanakan operasional dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum	Operasional dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan	

https://dishub.pemalangkab.go.id

Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
					Jumlah dokumen kerja sama penyediaan/ pengelolaan PSU perumahan	Kerjasama penyediaan/ pengelolaan PSU Perumahan	
					Jumlah laporan hasil serah terima PSU perumahan yang terverifikasi dari pengembang	Verifikasi dan penyerahan PSU perumahan dari pengembang	
				Kegiatan Penyelenggaraan PSU perumahan	**Persentase terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan PSU perumahan**	**Urusan penyelenggaraan PSU perumahan**	
					Jumlah rumah penerima manfaat dari penyediaan jaringan tenaga listrik	Penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat	
			Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman		**Persentase Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman**	**Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**	
				Kegiatan Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil	**Persentase terlaksananya kegiatan Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil**	**Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil**	
					Jumlah lapran hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembangan perumahan dengan kualifikasi kecil	Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Norma Standar Prosedur Kriteria dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
						perumahan dengan kualifikasi kecil	
			Terwujudnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan yang ditangani		**Persentase Sengketa Tanah yang ditangani**	**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam daerah Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya penanganan sengketa tanah garapan	**Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang ditangani**	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	
					Jumlah laporan data Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan Berita Acara Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya fasilitasi bidang tanah yang bersertifikat		**Persentase fasilitasi bidang tanah yang bersertifikat**	**Program Penatagunaan Tanah**	
				Terlaksananya Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten	**Persentase penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten**	**Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten**	
					Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	

https://dishub.pemalangkab.go.id

Tabel 4.2.
Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan
Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DP2KP		**59.034.003.632**	**3.456**	**42.974.398.000**	**3.628**	**50.404.039.863**	**3.556**	**50.404.039.863**	**3.644**	**50.404.039.863**	**3.601**	**53.400.807.350**	**-**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**- Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian Yang Terpenuhi** **- Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi**	**37.648.843.840**	**306**	**18.470.404.800**	**471**	**21.598.435.349**	**396**	**21.598.435.349**	**482**	**21.598.435.349**	**436**	**21.598.435.349**	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai regulasi**	**287.063.800**	**22**	**169.000.000**	**22**	**212.000.000**	**22**	**218.049.849**	**22**	**248.000.000**	**22**	**273.000.000**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.651.000	2	40.000.000	2	45.000.000	2	50.000.000	2	60.000.000	2	70.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41.120.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	169.292.800	4	60.000.000	4	85.000.000	4	86.049.849	4	95.000.000	4	100.000.000	
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	2	40.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	60.000.000	2	70.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Keuangan disusun sesuai regulasi**	**14.737.069.788**	**13**	**13.720.181.000**	**13**	**15.720.181.000**	**13**	**15.722.181.000**	**13**	**15.724.181.000**	**13**	**15.724.181.000**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14.726.347.500	123/14	13.710.181.000	123/14	15.710.181.000	125/14	15.710.181.000	125/14	15.710.181.000	128/14	15.710.181.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.154.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	4.568.288	12	4.000.000	12	4.000.000	12	5.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah disusun sesuai regulasi**	-	**7**	**3.019.300**	**7**	**5.000.000**	**7**	**3.500.000**	**7**	**7.000.000**	**7**	**7.000.000**	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	7	3.019.300	7	5.000.000	7	3.500.000	7	7.000.000	7	7.000.000	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah disusun sesuai regulasi**	**5.000.000**	**1**	**3.500.000**	**1**	**3.500.000**	**1**	**4.000.000**	**1**	**7.000.000**	**1**	**7.500.000**	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5.000.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	4.000.000	1	7.000.000	1	7.500.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi**	**300.000.000**	**40**	**50.000.000**	**200**	**240.000.000**	**120**	**140.000.000**	**200**	**250.000.000**	**160**	**200.000.000**	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	0	-	40	40.000.000	40	40.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	300.000.000	40	50.000.000	80	100.000.000	40	50.000.000	80	100.000.000	80	100.000.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	-	0	-	80	100.000.000	40	50.000.000	80	100.000.000	40	50.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Presentase Fasilitasi Administrasi umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi**	**544.444.000**	**118**	**382.000.000**	**123**	**543.000.000**	**128**	**548.000.000**	**133**	**569.549.849**	**138**	**578.000.000**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6.750.000	4	15.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	39.373.000	3	15.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20.000.000	3	12.000.000	3	15.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	89.747.000	3	90.000.000	3	110.000.000	3	110.000.000	3	120.000.000	3	110.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	75.134.000	4	80.000.000	4	110.000.000	4	110.000.000	4	110.000.000	4	120.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	313.440.000	100	165.000.000	105	260.000.000	110	260.000.000	115	270.000.000	120	280.000.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	1	5.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	9.549.849	1	8.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**	**101.930.760**	**32**	**60.000.000**	**31**	**515.000.000**	**30**	**490.000.000**	**32**	**505.000.000**	**21**	**501.049.849**	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	46.879.000	30	30.000.000	25	40.000.000	25	30.000.000	25	30.000.000	15	26.049.849	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55.051.760	2	30.000.000	5	75.000.000	4	60.000.000	6	75.000.000	5	75.000.000	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	0	-	0	-	1	400.000.000	-	-	1	400.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	0	-	1	400.000.000	0	-	1	400.000.000	-	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia**	**21.542.480.000**	**26**	**3.761.464.500**	**26**	**3.766.464.500**	**26**	**3.766.464.500**	**26**	**3.766.464.500**	**26**	**3.766.464.500**	

https://jdihpemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	18.002.402.000	12	412.509.500	12	412.509.500	12	412.509.500	12	412.509.500	12	412.509.500	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	2	10.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.540.078.000	12	3.338.955.000	12	3.338.955.000	12	3.338.955.000	12	3.338.955.000	12	3.338.955.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	**130.855.492**	**47**	**321.240.000**	**48**	**593.289.849**	**49**	**706.240.000**	**48**	**521.240.000**	**48**	**541.240.000**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50.000.000	70	191.240.000	70	215.240.000	70	224.240.000	70	228.240.000	70	233.240.000	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10.000.000	25	5.000.000	25	6.000.000	25	7.000.000	25	8.000.000	25	8.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54.500.000	20	15.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40.000.000	1	80.000.000	2	157.049.849	2	30.000.000	2	120.000.000	2	135.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26.355.492	1	30.000.000	1	200.000.000	2	430.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		**2.257.740.300**	**3150**	**943.993.200**	**3157**	**3.558.228.500**	**3160**	**3.558.228.500**	**3162**	**3.558.228.500**	**3165**	**5.558.228.500**	
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		**63.341.000**	**0**	**-**	**2**	**194.681.740**	**2**	**214.149.914**	**2**	**235.564.905**	**2**	**259.121.396**	
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1.877.000	0	-	1	120.310.300	1	132.341.330	1	145.575.463	1	160.133.009	
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	61.464.000	0	-	1	74.371.440	1	81.808.584	1	89.989.442	1	98.988.387	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		**499.056.000**	**38**	**181.301.200**	**40**	**1.889.949.979**	**43**	**1.955.085.897**	**45**	**1.812.839.475**	**48**	**3.314.123.422**	
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	273.125.000	2	1.300.000	2	230.481.250	2	244.670.295	2	299.882.313	2	439.870.544	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1.620.000	12	20.000.000	12	1.233.594.985	13	1.246.954.484	13	1.076.649.932	14	2.174.314.925	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	122.195.000	9	75.001.200	10	260.972.403	11	282.069.643	12	236.776.608	13	480.454.268	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	102.116.000	15	85.000.000	16	164.901.341	17	181.391.475	18	199.530.623	19	219.483.685	
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		**234.311.000**	**7**	**100.000.000**	**7**	**217.930.000**	**7**	**205.720.000**	**7**	**205.720.000**	**7**	**258.600.000**	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	234.311.000	7	100.000.000	7	217.930.000	7	205.720.000	7	205.720.000	7	258.600.000	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		**171.599.000**	**12**	**20.000.000**	**12**	**107.400.000**	**12**	**73.000.000**	**12**	**83.000.000**	**12**	**92.720.000**	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	171.599.000	12	20.000.000	12	107.400.000	12	73.000.000	12	83.000.000	12	92.720.000	
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		**397.028.500**	**3018**	**190.000.000**	**3013**	**299.952.490**	**3013**	**355.472.490**	**3013**	**320.622.702**	**3013**	**394.143.352**	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	9.528.500	7	9.760.000	1	31.422.840	1	41.422.840	1	21.573.052	1	41.573.052	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	0	-	1	20.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	22.500.000	3000	65.000.000	3000	75.000.000	3000	75.000.000	3000	75.000.000	3000	75.000.000	
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	65.000.000	1	2.740.000	1	23.292.000	1	23.292.000	1	23.292.000	1	23.292.000	
Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	300.000.000	10	112.500.000	10	150.237.650	10	190.757.650	10	175.757.650	10	229.278.300	
Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		**251.690.000**	**6**	**306.202.500**	**7**	**462.684.441**	**7**	**435.607.364**	**7**	**536.119.299**	**7**	**842.872.000**	
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.510.000	0	-	1	80.876.400	1	88.964.040	1	97.860.444	1	107.646.488	
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	7.015.000	4	7.500.000	4	8.488.150	4	9.336.965	4	10.270.662	4	11.297.728	
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	243.165.000	2	298.702.500	2	373.319.891	2	337.306.359	2	427.988.194	2	723.927.784	
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		**8.785.000**	**30**	**3.000.000**	**35**	**10.629.850**	**35**	**11.692.835**	**35**	**12.862.119**	**35**	**14.148.330**	
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis	8.785.000	30	3.000.000	35	10.629.850	35	11.692.835	35	12.862.119	35	14.148.330	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Persetujuan Teknis Andalalin	Andalalin yang terawasi												
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		**48.758.000**	**4**	**15.000.000**	**6**	**68.000.000**	**6**	**73.000.000**	**6**	**79.000.000**	**6**	**86.000.000**	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	23.248.500	0	-	1	28.000.000	1	30.000.000	1	33.000.000	1	36.000.000	
Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	25.509.500	4	15.000.000	4	30.000.000	4	33.000.000	4	36.000.000	4	40.000.000	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	-	0	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		**187.642.000**	**12**	**75.500.000**	**12**	**100.000.000**	**12**	**110.000.000**	**12**	**127.000.000**	**12**	**140.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	187.642.000	12	75.500.000	12	100.000.000	12	110.000.000	12	127.000.000	12	140.000.000	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		**390.013.800**	**22**	**51.500.000**	**22**	**107.000.000**	**22**	**117.500.000**	**22**	**138.000.000**	**22**	**148.500.000**	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	305.367.800	12	50.000.000	12	100.000.000	12	110.000.000	12	130.000.000	12	140.000.000	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	84.646.000	10	1.500.000	10	7.000.000	10	7.500.000	10	8.000.000	10	8.500.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		**5.516.000**	**1**	**1.489.500**	**1**	**100.000.000**	**1**	**7.000.000**	**1**	**7.500.000**	**1**	**8.000.000**	
Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.516.000	1	1.489.500	1	100.000.000	1	7.000.000	1	7.500.000	1	8.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**PERSENTASE PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA**	**308.242.456**		**200.000.000**		**742.013.590**		**742.013.590**		**742.013.590**		**742.013.590**	
Pendataan Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota	**Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota**	**7.679.000**		**25.000.000**		**67.013.590**		**67.013.590**		**67.013.590**		**67.013.590**	
Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Jumlah dokumen data identifikasi lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Jumlah dokumen data rumah korban bencana kabupaten/ kota kejadian sebelumnya yang belum tertangani		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah akibat bencana	Jumlah dokumen data rumah yang terkena bencana kabupaten/ kota berdasarkan tingkat kerusakan rumah		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Jumlah dokumen data rumah sewa milik masyarakat, rumah susun, dan rumah khusus		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
Identifikasi perumahan di lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/ kota	Jumlah dokumen data rumah di lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/ kota		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
Pendataan dan verifikasi calon penerima rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten	Jumlah dokumen data bakal calon penerima rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/ kota yang terverifikasi	7.679.000	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana kabupaten/ kota	Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana kabupaten/ kota		1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	
Pendataan dan verifikasi calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah dokumen data bakal calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/ kota yang terverifikasi		1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	42.013.590	1 Dokumen	42.013.590	1 Dokumen	42.013.590	1 Dokumen	42.013.590	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota	**Persentase terlaksananya kegiatan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota**	**73.957.356**		**7.000.000**		**25.000.000**		**25.000.000**		**25.000.000**		**25.000.000**	
Sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana	Jumlah orang/ sukarelawan yang mengikuti sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/ kota	34.664.495	25 Orang	5.000.000	25 Orang	15.000.000	25 Orang	15.000.000	25 Orang	15.000.000	25 Orang	15.000.000	
Pembentukan dan pelatihan tim satgas, tim pendamping dan fasilitator	Jumlah orang pada tim satgas, tim pendamping, dan fasilitator yang terbentuk dan terlatih												
Koordinasi untuk menyepakatin penerima dan jenis pelayanan	Jumlah dokumen data penerima bantuan berdasarkan jenis layanan												
Rembug warga untuk menentujan calon penerima rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/ kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan calon penerima rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/ kota												
Rembug warga untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/ kota												

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses pembiayaan perumahan	Jumlah orang yang mmengikuti sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses pembiayaan perumahan	39.292.861	25 Orang	2.000.000	25 Orang	10.000.000	25 Orang	10.000.000	25 Orang	10.000.000	25 Orang	10.000.000	
Sosialisasi tentang mekanisme penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi tentang mekanisme penggantian ha katas tanah dan/atau bangunan		25 Orang		25 Orang		25 Orang		25 Orang		25 Orang		
Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota	**Persentase terlaksananya Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota**	**99.503.900**		**143.000.000**		**470.000.000**		**470.000.000**		**470.000.000**		**470.000.000**	
Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Jumlah rumah korban bencana kabupaten/ kota	99.503.900	20 Unit	140.000.000	25 Unit	300.000.000	25 Unit	300.000.000	25 Unit	300.000.000	25 Unit	300.000.000	
Pembangunan rumah bagi korban bencana	Jumlah rumah bagi korban bencana kabupaten/ kota yang terbangun		10 Unit	3.000.000	10 Unit	170.000.000	10 Unit	170.000.000	10 Unit	170.000.000	10 Unit	170.000.000	
Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten/ kota	Jumlah rumah pada lokasi relokasi program kabupaten/ kota yang dilaksanakan operasional dan pemeliharaan												
Fasilitas penyediaan rumah bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah rumah tangga bagi korban bencana kabupaten/ kota yang mendapatkan fasilitas penyediaan rumah												

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fasilitas penyediaan rumah bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/ kota	Jumlah rumah tangga yang terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/ kota yang mendapatkan fasilitas penyediaan rumah												
Pembangunan rumah bagi masyrakat yang terdampak relokasi program kabupaten/ kota	Jumlah rumah bagi masyarakat yang terdampak relokasi program kabupaten/ kota												
Operasional dan pemelihataan lingkungan perumahan bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah rumah pada perumahan bagi korban bencana kabupaten/ kota yang dilaksanakan operasional dan pemeliharaan												
Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/ kota	Kimlah rumah khusus beserta PSU bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/ kota												
Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana kabupaten/ kota												
Pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota	**Persentase terlaksananya kegiatan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota**	-		**10.000.000**		**30.000.000**		**30.000.000**		**30.000.000**		**30.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pelaksanaan pembagian rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/ kota	Jumlah rumah tangga terkena relokasi program kabupaten/ kota yang mendapatkan fasilitas bantuan penyediaan rumah												
Penatausahaan serah terima rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/ kota	Jumlah dokumen serah terima rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/ kota												
Penatausahaan serah terima rumah bagi korban bencana kabuapten/ kota	Jumlah dokumen serah terima rumah bagi korban bencana kabupaten/ kota		1 Dokumen	5.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
Pelaksanaan pembagian rumah bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah rumah tangga terdampak bencana kabupaten/ kota yang mendapatkan fasilitasi bantunan penyediaan rumah			5.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	**Persentase terlaksananya kegiatan pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus**	**77.685.000**		**10.000.000**		**120.000.000**		**120.000.000**		**120.000.000**		**120.000.000**	
Fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/ penghuni rumah susun	Persentase fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/ penghuni rumah susun	43.717.500	100	5.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	
Penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	Persentase pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	33.967.500	100	5.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pembangunan rumah khusus	Jumlah rumah khusus yang dibangun												
Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penjualan rumah	Jumlah dokumen Hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penjualan rumah												
Penerbitan Izin Pembangunan dan pengembangan perumahan	**Persentase terlaksananya kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan pengembangan perumahan**	**49.417.200**		**5.000.000**		**30.000.000**		**30.000.000**		**30.000.000**		**30.000.000**	
Fasilitas pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen kesepakatan dengan pengembang/ Pelaku pembangunan rumah untuk penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik	49.417.200	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	
Penguatan dan pembinaan kepada BLU/BUMD untuk penyelenggaraan rumah sederhana	Jumlah pegawai BLU/BUMD yang mengikuti penguatan dan pembinaan untuk penyelenggaraan rumah sederhana												
Koordinasi dan sinkronisasi pengendaliian pembangunan dan pengembangan perumahan	Jumlah laporan hasil koordiansi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan												

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koordinasi dan sinkronsisasi kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha (KPDBU) perumahan umum/ rumah susun umum	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha (KPDBU) perumahan umum/ Rumah susun Umum												
Pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan system layanan informasi dan komunikasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah system layanan informasi dan komunikasi bidang perumahan dan kawasan permukiman yang terbangun/ terpelihara												
Fasilitasi pemenuhan kesesuaian rencana tapak dan lantai perumahan	Jumlah dokumen rencana tapak dan lantai perumahan yang diselaraskan												
Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB)	**Persentase terlaksananya kegiatan Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB)**	-		-		-		-		-		-	
Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG)	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG)												
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani**	**9.231.818.603**		**15.000.000**		**39.290.000**		**39.290.000**		**39.290.000**		**39.290.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	**Jumlah Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman**	-		-		-		-		-		-	
Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen kesepakatan dengan pengembang/ pelaku pembangunan rumahh untuk penerbitan izin pembangunan dan pengemabngan kawasan permukiman terintegrasi secara elektronik												
Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kawasan permukiman												
Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	**Persentase terlaksananya kegiatan Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha**	**24.920.900**		-		-		-		-		-	
Penyusunan/ review/ legalisasi kebijakan bidang PKP	Jumlah dokumen kebijakan bidang PKP yang tersusun/ tereview/ Terlegalisasi												
Penatausahaan serah terima rumah baru layak huni bagi masyarakat di kawasan permukiman	Jumlah dokumen serah terima rumah baru layak huni bagi masyarakat di kawasan permukiman kumuh	24.920.900	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		

https://dishub.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha												
Pelaksanaan pembagian rumah bagi masyarakat untuk peningkatan kualittas permukiman kumuh dengan luasan di bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tangga terdampak peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luasan di bawah 10 Ha												
Pembentukan/ pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh	Jumlah kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh yang dibentuk/ dibina												
Penatausahaan serah terima rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/ peremajaan/ permukiman kembali kawasan permukiman kumuh	Jumlah dokumen serah terima rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/ peremajaan/ permukiman kembali kawasan permukiman kumuh												
Survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh	Jumlah dokumenn hasil survei dan penatapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh		1 Dokumen										

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah	Jumlah rumah tangga yang terfasilitasi peningkatan kesadaran dakam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hokum tentang kepemilikan rumah												
Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	**Persentase terlaksananya kegiatan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha**	**9.206.897.703**		**15.000.000**		**39.290.000**		**39.290.000**		**39.290.000**		**39.290.000**	
Perbaikan rumah tidak layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaikan		50		50		50		50		50		
Kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU	Jumlah dokumen kesepakatan kerja sama dalam perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU			5.000.000		14.290.000		14.290.000		14.290.000		14.290.000	
Koordinasi dan sinkronsisasi pengendaliasn penyelenggaraan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh			10.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Pendataan dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh	Jumlah dokumen data permukiman kumuh yang terverifikasi		1 Dokumen										

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pelaksanaan peremajaan kawasan permukiman kumuh	Luas kawasan permukiman kumuh yang diremajakan		0,5 Ha		0,5 Ha		0,5 Ha		0,5 Ha		0,5 Ha		
Fasilitasi penyediaan perumahan sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan gasilitas penyediaan perumahan sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha												
Pelaksanaan pemukiman kembali kawasan permukiman kumuh	Luas kawasan permukiman kumuh yang dimukimkan kembali												
Pembangunan rumah baru layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah baru layak huni yang dibangun untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	9.206.897.703	10 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit		
Pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh	Luas permukiman kumuh yang dipugar												
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	**Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang ditangani**	**2.369.066.000**		**5.000.000**		**941.514.784**		**941.514.784**		**941.514.784**		**1.938.282.271**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/ kota	**Persentase terlaksananya kegiatan Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/ kota**	**2.369.066.000**		**5.000.000**		**941.514.784**		**941.514.784**		**941.514.784**		**1.938.282.271**	
Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	2.369.066.000	50	5.000.000	50	941.514.784	50	941.514.784	50	941.514.784	50	1.938.282.271	
Pembangunan rumah baru layak huni dalam rangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru	Jumlah rumah baru layak huni yang dibagun dalam rangka pencegahan kumuh												
Penatausahaan serah terima rumah baru layak huni bagi masyarakat untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya oermukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh	Jumlah dokumen serah terima rumah baru layak huni bagi masyarakat untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pelaksanaan pembaguan rumah baru layak huni bagi masyarakat untuk encegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan fasilitasi bantuan penyediaan rumah untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh												
Pengawasan dan pengdendalian dalam tangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru	Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendaluan dalam rangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru												
Penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	Jumlah orang yng mengikuti penyadaran public pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh												
Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukimann kumuh baru	Jumlah orang yang mengikuti pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru												
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN	**Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)**	**7.155.173.033**		**23.190.000.000**		**23.366.800.140**		**23.366.800.140**		**23.366.800.140**		**23.366.800.140**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
UTILITAS UMUM (PSU)													
Urusan penyelenggaraan PSU perumahan	**Persentase terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan PSU perumahan**	**7.155.173.033**		**23.190.000.000**		**23.366.800.140**		**23.366.800.140**		**23.366.800.140**		**23.366.800.140**	
Perencanaan penyediaan PSU perumahan	Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU perumahan		1 Dokumen	50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	7.131.561.734	11 Kelurahan	23.080.000.000	11 Kelurahan	23.256.800.140	11 Kelurahan	23.256.800.140	11 Kelurahan	23.256.800.140	11 Kelurahan	23.256.800.140	
Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan	9.213.700	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	
Sosialisasi standar, prosedur dan kriteria serah terima PSU	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur dan kriteria serah terima (PSU)		10 Orang		10 Orang		10 Orang		10 Orang		10 Orang		
Perbaikan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Jumlah lokasi PSU perumahan yang dilaksanakan perbaikan		2 Lokasi		2 Lokasi		2 Lokasi		2 Lokasi		2 Lokasi		

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Operasional dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan	Jumlah lokasi pada perumahan yang dilaksanakan operasional dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum												
Kerjasama penyediaan/ pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen kerja sama penyediaan/ pengelolaan PSU perumahan												
Verifikasi dan penyerahan PSU perumahan dari pengembang	Jumlah laporan hasil serah terima PSU perumahan yang terverifikasi dari pengembang	14.397.599	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
Urusan penyelenggaraan PSU perumahan	**Persentase terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan PSU perumahan**	-		-		-		-		-		-	
Penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat	Jumlah rumah penerima manfaat dari penyediaan jaringan tenaga listrik												
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	**Persentase Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman**	**34.679.400**		**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hokum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil	**Persentase terlaksananya kegiatan Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil**	**34.679.400**		**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**	
Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil	Jumlah lapran hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembangan perumahan dengan kualifikasi kecil	34.679.400	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Sengketa Tanah yang ditangani**	**28.440.000**		**100.000.000**		**107.757.500**		**107.757.500**		**107.757.500**		**107.757.500**	
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang ditangani**	**28.440.000**		**100.000.000**		**107.757.500**		**107.757.500**		**107.757.500**		**107.757.500**	
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	18.440.000	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Berita Acara Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	107.757.500	1 Dokumen	107.757.500	1 Dokumen	107.757.500	1 Dokumen	107.757.500	
Program Penatagunaan Tanah	**Persentase fasilitasi bidang tanah yang bersertifikat**	**2.401.137.520**		**100.000.000**		**1.411.394.300**		**1.411.394.300**		**1.411.394.300**		**1.411.394.300**	
Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten	**Persentase penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten**	**2.401.137.520**		**100.000.000**		**1.411.394.300**		**1.411.394.300**		**1.411.394.300**		**1.411.394.300**	
Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	2.401.137.520	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	1.411.394.300	1 Dokumen	1.411.394.300	1 Dokumen	1.411.394.300	1 Dokumen	1.411.394.300	

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.2. URAIAN SUBKEGIATAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Uraian subkegiatan dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah sangat penting untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Subkegiatan prioritas harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi pedoman pembangunan daerah dan dapat diterjemahkan menjadi aksi-aksi nyata yang dapat diimplementasikan oleh Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang. Subkegiatan harus dirancang dan dilaksanakan secara detail, dengan mempertimbangkan sumber daya, waktu, dan target capaian yang jelas.

Tabel 4.3.
Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan**	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	
			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung)	
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			Penigkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pengujian berkala kendaraan bermotor	
			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
			Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
			Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
			Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	
			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan inspeksi keselamatan angkutan pada terminal tipe C	
			Pelaksanaan Inspeksi, audit dan pemantauan system manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum	
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
			Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
			Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**Terwujudnya Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota**	**Pendataan Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota**	
			Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	
			Pendataan dan verifikasi calon penerima rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten	
			Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota	
			Sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana	
			Sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses pembiayaan perumahan	
			Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota	
			Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	
			Pembangunan rumah bagi korban bencana	
			Pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota	
			Penatausahaan serah terima rumah bagi korban bencana kabuapten/ kota	

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
			Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	
			Fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/ penghuni rumah susun	
			Penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	
			Penerbitan Izin Pembangunan dan pengembangan perumahan	
			Fasilitas pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**Terwujudnya kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani**	**Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha**	
			Penatausahaan serah terima rumah baru layak huni bagi masyarakat di kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	
			Survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh	
			Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	
			Pendataan dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh	
			Pelaksanaan peremajaan kawasan permukiman kumuh	
			Pembangunan rumah baru layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	**Terwujudnya Rumah Tidak Layak Huni Yang ditangani**	**Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/ kota**	
			Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	
			Penatausahaan serah terima rumah baru layak huni bagi masyarakat untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya oermukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh	
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	**Terwujudnya perumahan yang sudah dilengkapi**	**Urusan penyelenggaraan PSU perumahan**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
		PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		
			Perencanaan penyediaan PSU perumahan	
			Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	
			Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	
			Sosialisasi standar, prosedut dan kriteria serah terima PSU	
			Perbaikan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	
			Verifikasi dan penyerahan PSU perumahan dari pengembang	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	**Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman**	**Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hokum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil**	
			Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil	
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Terwujudnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan yang ditangani**	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	
			Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Program Penatagunaan Tanah	**Terlaksananya fasilitasi bidang tanah yang bersertifikat**	**Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten**	
			Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.3. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja utama Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta menjadikan IKU tersebut sebagai prioritas utama.

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rasio konektivitas	%	71,72	72,02	72,32	72,62	72,92	73,22	
2	VC Rasio	Rasio	0,38	0,36	0,36	0,34	0,34	0,33	
3	Indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh	Indeks	82,00	82,25	82,50	82,75	83,00	83,25	
4	Luasan kawasan kumuh	Ha	197,758	197,258	196,758	196,258	195,758	195,258	
5	Backlog rumah	Unit	16.812	16.450	16.088	15.726	15.364	15.000	
6	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak	%	69,48	71,06	72,64	74,20	75,77	77,32	
7	Persentase kawasan permukiman kimuh di bawah 10 ha tertangani	%	31,4	31,56	31,72	31,88	32,04	32,20	
8	Indeks Pencapaian SPM PRKP	Indeks	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	80	80	81	82	83	84	
10	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	100	100	100	100	100	100	

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.4. TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang. IKK membantu mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan, sehingga dapat digunakan untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi efektivitas suatu program atau kegiatan.

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rasio konektivitas	%	71,72	72,02	72,32	72,62	72,92	73,22	
2	VC Rasio	Rasio	0,38	0,36	0,36	0,34	0,34	0,33	
3	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	
4	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	31,40	31,56	31,72	31,88	32,04	32,20	
6	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)								
7	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	34,86	39,45	44,04	48,62	53,21	57,80	
8	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	80	80	81	82	83	84	
9	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	100	100	100	100	100	100	
10	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	%							

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
11	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%							
12	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%							
13	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	80	80	81	82	83	84	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB 5
PENUTUP

5.1. KESIMPULAN PENTING SUBSTANSIAL

Kesimpulan penting substansial Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 telah mengadopsi upaya dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran visi “Pemalang Bercahaya” dan misi “RHAPSODI” pembangunan Kabupaten Pemalang dalam lima tahun ke depan.
2. Tujuan Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 berdasarkan target-target yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan adalah meningkatnya kinerja transportasi dan akses hunian layak yang aman, terjangkau, berkelanjutan serta pertanahan berkeadilan.
3. Strategi, Kebijakan dan Program dalam Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang perhubungan, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan serta dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yaitu Terwujudnya Pemalang Bercahahaya, Bersih, Cakap, Handal dan Mulya dan meralisasikan salah satu tujuan daerah yaitu meningkatnya daya saing pembangunan daerah
4. Kegiatan dan Subkegiatan dalam Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan rincian aktivitas-aktivitas konkret yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang.

5.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang tahun 2026 sampai dengan tahun 2029, dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang pada tahun 2030 sebagai tahun transisi.

5.3 PELAKSANAAN PENGENDALIAN EVALUASI

Pelaksanaan pengendalian evaluasi Renstra Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 bertujuan untuk memastikan pencapaian target program dan kegiatan, menilai kinerja serta mengendalikan risiko strategis Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang. Pengendalian memastikan

https://jdih.pemalangkab.go.id

bahwa program dan kegiatan sesuai dengan rencana, sedangkan evaluasi menilai pencapaian target dan identifikasi faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Dalam pelaksanaan pengendalian dilakukan minimal satu kali selama periode 5 tahun (Periode Renstra).

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta mekanisme evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk prosedur perubahan terhadap keduanya dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dinyatakan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu lima tahun. Renstra disusun sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), setiap perangkat daerah wajib menyusun rencana pembangunan jangka menengah atau Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kewajiban ini ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 272 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD.” Ketentuan lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 7 UU Nomor 25 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode lima tahun.

Dengan demikian, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pemalang wajib menyusun dokumen Renstra yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Pemalang. DLH Kabupaten Pemalang adalah instansi pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang berada di bawah kewenangan daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.

Pembentukan perangkat daerah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi, mengoptimalkan nilai layanan publik, mencapai hasil yang lebih optimal, menyatukan berbagai fungsi, serta menghapuskan struktur dan tugas yang tidak efisien, agar organisasi dapat memberikan pelayanan yang maksimal dalam mendukung pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Renstra DLH Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029 disusun mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029. Dokumen ini menjadi panduan pelaksanaan pembangunan di sektor lingkungan hidup oleh DLH Kabupaten Pemalang yang dijabarkan dalam bentuk rencana kerja tahunan selama periode lima tahun tersebut.

Memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten Pemalang menyusun RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029. RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 tersebut menjadi pedoman

dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

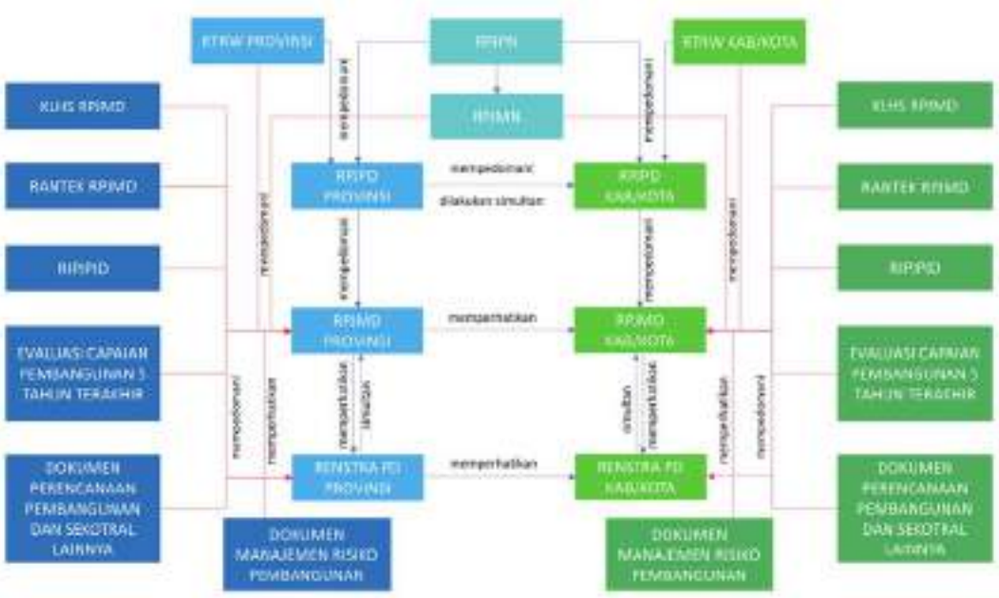
RTRW PROVINSI
RPJPN
RTRW KABUPATEN
KLHS RPJMD
RPJMN
KLHS RPJMD
RANTEK RPJMD
RPJPD PROVINSI
RPJPD KABUPATEN
RANTEK RPJMD
RPJPD
RPJPD
EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN 5 TAHUN TERAKHIR
RPJMD PROVINSI
RPJMD KABUPATEN
EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN 5 TAHUN TERAKHIR
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN SEKTORAL LAINNYA
RENSTRA PD PROVINSI
RENSTRA PD KABUPATEN
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN SEKTORAL LAINNYA
DOKUMEN MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN
DOKUMEN MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN
mengacu
menyelaraskan
mengendalikan
mengevaluasi
menyerasikan
menyelaraskan
mengacu
mengacu
mengacu

https://jdih.pemalangkab.go.id

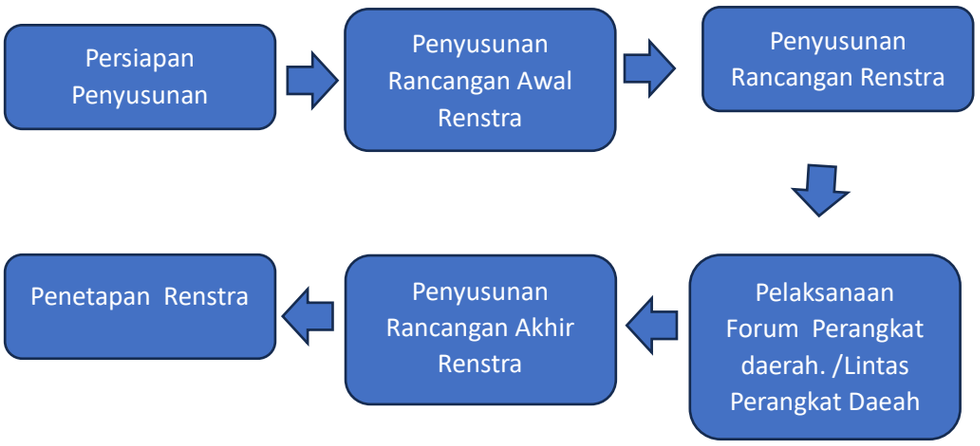

Gambar 1.2. Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

https://jdih.pemalangkab.go.id

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161).
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ...);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor ...);
27. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kebersihan dan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;
28. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
29. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang; dan
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

https://jdih.pemalangkab.go.id

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang yang dapat memastikan arah kinerja menuju tercapainya sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang 2025-2029 adalah :

1. Memberi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam pecapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029;
2. Mengidentifikasi isu - isu strategis bidang lingkungan hidup dan keterkaitannya dengan isu strategis pembangunan daerah dan isu strategis Lingkungan Hidup tingkat nasional;
3. Merumuskan indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029;
4. Merumuskan kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan indikatif untuk mencapai sasaran strategis/indikator kinerja utama;
5. Meningkatkan sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;
6. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika, sebagi berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi Latara Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi Program, Kegiatan dan Subkegiatan penyelenggaraan Dinas Lingkungan Hidup, serta kinerja penyelenggaraan Dinas Lingkungan Hidup

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Rencana Strtegis Dinas Lingkungan Hidup.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1.Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, dapat dijabarkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, terdiri atas:
   1) Sub Bagian Bina Program dan Keuangan; dan
   2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas,;
d. Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan;
e. UPTD; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing komponen struktur Dinas Lingkungan Hidup dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:

1) perumusan kebijakan di bidang penataan, penaatan dan peningkatan kapasitas serta pengendalian dan konservasi lingkungan;
2) pelaksanaan kebijakan di bidang penataan, penaatan dan peningkatan kapasitas serta pengendalian dan konservasi lingkungan;
3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, penaatan dan peningkatan kapasitas serta pengendalian dan konservasi lingkungan;
4) pelaksanaan adminitrasi dina sesuai dengan lingkungan tugasnya; dan
5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya

b. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok, mempunyai fungsi:

1) Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
2) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
3) Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatusahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kerasipan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
4) Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
5) Penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
6) Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
7) Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup; dan
8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi membawahkan: .

1) Sub Bagian Bina Program dan Keuangan; dan
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas

Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, penaatan dan peningkatan. Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas;
2) pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas;
3) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas;
4) pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas;
5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas; dan
6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan

Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan konservasi lingkungan. Kepala Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan;
2) pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan;
3) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan;
4) pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan;
5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan; dan
6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Unit Kebersihan dan Persampahan

Unit Kebersihan dan Persampahan dipimpin oleh Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Unit Kebersihan dan Persampahan mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis opersional di bidang pengelolaan kebersihan dan persampahan. Kepala Unit Kebersihan dan Persampahan dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi :

1) Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang kebersihan dan persampahan;
2) Pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Laboratorium Lingkungan

Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh Kepala Laboratorium Lingkungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang laboratorium lingkungan hidup. Kepala Laboratorium Lingkungan dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi :

1) Perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang Laboratorium Lingkungan;
2) Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang Laboratorium Lingkungan;
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4) Pelaksanaan administrasi sesuai lingkup tugasnya; dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

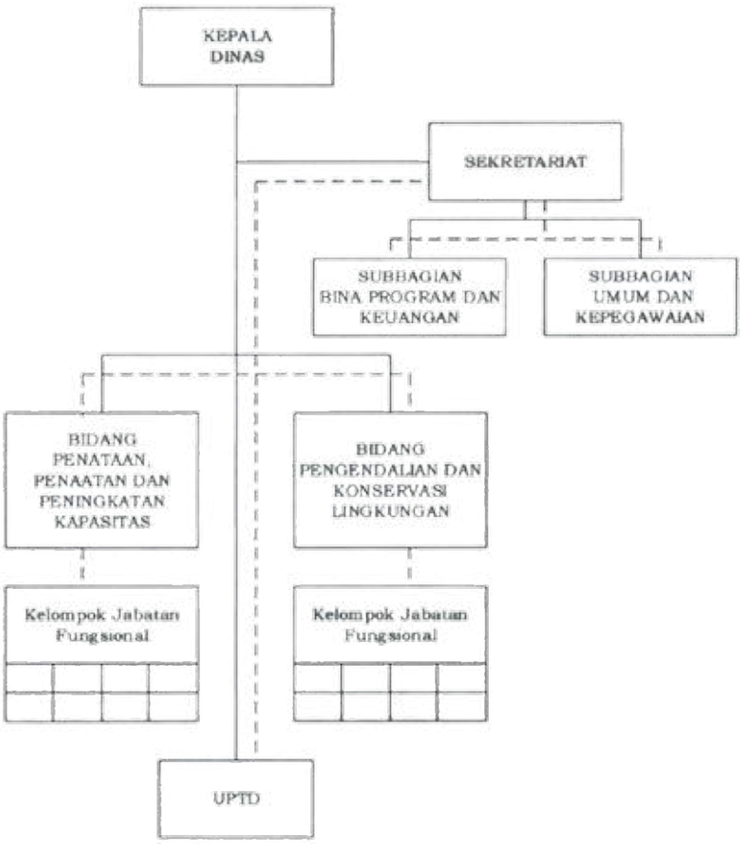

2.1.2.Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya aset. Masing-masing sumber daya tersebut dijelaskan melalui uraian di bawah ini:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur pada Perangakat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang pada tahun 2024 tercatat sejumlah 398 Pegawai dengan perincian sebagai berikut

Tabel 2.1. Data ASN Berdasarkan Jabatan Tahun 2024

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan IV	2	2	4
2	Golongan III	30	11	41
3	Golongan II	93	15	108
4	Golongan I	2	0	2
5	Non Golongan (Non ASN)	217	26	243
	Jumlah	344	54	398

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

Berdasarkan latar belakang pendidikan formal yang dimiliki, pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang cukup baik, karena sebagian besar berpendidikan S1 sebanyak 39 orang, S2 sebanyak 5 orang, S3 sebanyak 1 orang, D3 sebanyak 6 orang dan SMA sebanyak 180 orang. Data pendidikan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang seperti tertuang pada tabel dibawah :

Tabel 2.2. Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan 2024

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1	S3/Doktor	1	0	0	0	1
2	S2/ Magister	2	3	0	0	5
3	S1/ Sarjana	11	10	8	10	39
4	Diploma3	1	1	3	1	6
5	Diploma 2	0	0	0	0	0
6	Diploma 1	0	0	0	0	0
7	SMA/ Sederajat	42	3	126	9	180
8	SMP/ Sederajat	42	5	42	6	95
9	SD	30	4	38	0	72
	Jumlah Total	129	26	217	26	398

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, 2025

b. Sumber Daya Aset

Sarana dan prasana yang dimiliki Dinas Liingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya adalah berupa aset tetap, sebagai berikut:

Tabel 2.3. Rincian Aset Tetap tahun 2024

No	Jenis Sarana/ Prasarana	Kondisi		Jumlah	Keterangan (Lengkap/ Kurang/ Mencukupi)
		Baik	Rusak		
1	Bangunan Kantor dinas	1		1	
2	Bangunan Kantor Unit Kebersihan & Persampahan	1		1	
3	Bangunan Kantor Laboratorium Lingkungan	1		1	
4	TPA sampah	1		1	
5	TPST 3R	17		17	
6	TPS Permanen	122		122	
7	Transfer Depo	4		4	
8	IPAL	1		1	
9	Excavator	2		2	
10	Bulldozer	2		2	
11	Dumptruck	34		34	
12	Arm roll	4		4	
13	Mobil Pick Up	5		5	
14	Sepeda Motor Roda 3	7		7	
15	Becak Sampah	50		50	
16	Mobil Laboratorium	1		1	

No	Jenis Sarana/ Prasarana	Kondisi		Jumlah	Keterangan (Lengkap/ Kurang/ Mencukupi)
		Baik	Rusak		
17	Mobil urinoir	1		1	
18	Mobil Tinja	1		1	
19	Peralatan komputer : PC, Laptop, Printer, dll	124		124	
20	Perlengkapan kantor dan mebelair	330		330	
21	Peralatan Laboratorium Lingkungan	43		43	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, 2025

2.1.3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Lingkungan Hidup merupakan bidang pembangunan yang menempati posisi dan peran strategis dalam penanganan permasalahan lingkungan yang terjadi pada tingkat kabupaten. Keberhasilan pembangunan lingkungan hidup akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya lingkungan yang aman dan nnyaman. Lingkungan Hidup pada hakekatnya bertujuan mengembangkan potensi alam serta menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup serta menjadikan lingkungan daerah kabupaten untuk mendukung gerakan pengurangan efek rumah kaca. Berikut kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.4. Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun					Pertumbuhan Kinerja				Rata-Rata
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Pencemaran Udara	Indeks	85.62	86.26	84.16	85.49	92.83	0.64	-2.1	1.33	7.34	1.80
2	Indeks Pencemaran Air	Indeks	47.33	50.00	48.33	53.33	48.33	2.67	-1.67	5	-5	0.25
3	indeks tutupan lahan	Indeks	73.56	48.54	48.54	52.40	50.39	-25.02	0	3.86	-2.01	-5.7925
4	Persentase luasan Ruang terbuka Hijau (RTH) Publik	%	43.070	43.074	43.078	43.078	43.083	0.004	0.004	0.000	0.005	0.00325
5	Persentase penanganan lahan kritis	%	0.0263	0.0363	0.0463	0.0463	0.0002	0.0100	0.0100	0.0000	-0.0461	-0.0065365
6	Persentase penanganan sampah	%	59.33	56.30	59.50	59.60	59.82	-3.03	3.20	0.10	0.22	0.12
7	Persentase pengurangan sampah	%	21.17	24.03	25.88	25.24	26.38	2.86	1.85	-0.64	1.14	1.30
8	Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	66.67	0.00	0.00	0.00	-33.33	-8.3325
9	Persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
10	Penyelesaian Kasus Lingkungan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
11	Persentase masyarakat yang aktif mengelola lingkungan	%	10.00	15.00	20.00	40.00	60.00	5.00	5.00	20.00	20.00	12.5

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun					Pertumbuhan Kinerja				Rata-Rata
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	78.92	79.93	80.11	80.21	80.42	1.01	0.18	0.1	0.21	0.38
13	Nilai SAKIP	Nilai	53.89	56.01	62.15	63.25	64.44	2.12	6.14	1.10	1.19	2.64

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.5. Tabel Evaluasi Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-				Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Indeks Pencemaran Udara	Indeks	89.37	89.43	89.48	89.53	89.58	89.63	86.26	84.16	85.49	92.83	96.52	94.11	95.54	103.69
2	Indeks Pencemaran Air	Indeks	46.24	46.56	47.28	47.59	47.83	48.24	50.00	48.33	53.33	48.33	108.13	103.80	112.80	101.55
3	indeks tutupan lahan	Indeks	70.03	70.08	70.12	70.16	70.20	70.24	48.54	48.54	52.40	50.39	69.31	69.26	74.73	71.82
4	Persentase luasan Ruang terbuka Hijau (RTH) Publik	%	43.074	43.078	43.083	43.087	43.092	43.096	43.074	43.078	43.078	43.083	100.00	100.00	99.99	99.99
5	Persentase penanganan lahan kritis	%	0.0363	0.0463	0.0563	0.0663	0.0763	0.0863	0.0363	0.0463	0.0463	0.0002	100.00	100.00	82.24	0.23
6	Persentase penanganan sampah	%	73.99	72.92	71.83	70.95	70.00	70.00	56.30	59.50	59.60	59.82	76.09	81.60	82.97	84.31
7	Persentase pengurangan sampah	%	23.94	25.88	26.94	27.89	30.00	30.00	24.03	25.88	25.24	26.38	100.38	100.00	93.69	94.59
8	Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	66.67	100.00	100.00	100.00	66.67

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-				Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	Persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
10	Penyelesaian Kasus Lingkungan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
11	Persentase masyarakat yang aktif mengelola lingkungan	%	15.00	20.00	40.00	60.00	100.00	100.00	15.00	20.00	40.00	60.00	100.00	100.00	100.00	100.00
12	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	79.92	80.15	80.38	80.61	80.84	81.07	79.93	80.11	80.21	80.42	100.01	99.95	99.79	99.76
13	Nilai SAKIP	Nilai	56.01	58.01	60.01	62.01	64.01	66.01	56.01	62.15	63.25	64.44	100.00	107.14	105.40	103.92

Berdasarkan tabel 2.5 menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang pada tahun 2021-2024 sudah mencapai kategori sangat tinggi. Adapun tingkat pencapaian kinerja secara lengkap sebagai berikut :

1. Ketercapaian kinerja indikator sasaran meningkatnya indeks kualitas udara tahun 2021-2024 sudah mencapai kategori Sangat Tinggi meskipun capaiannya fluktuatif. Pada tahun 2021 mencapai 96,52%, kemudian pada tahun 2022 turun menjadi 94,11%, pada tahun 2023 naik menjadi 95.54% dan tahun 2024 mencapai 103.69%. Indeks kualitas udara tersebut mempunya porsi besar dalam penentuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, pertimbangannya adalah udara merupakan unsur penting dalam kehidupan yang mutlak harus tersedia untuk mempertahankan hidup. Parameter kualitas udara ambien yang digunakan untuk perhitungan indeks kualitas udara adalah SO_2 dan NO_2. Lokasi pemantauan kualitas udara ambien dilakukan di 4 (empat) Lokasi yang mewakili kawasan padat transportasi, kawasan pemukiman, kawasan perkantoran dan kawasan industri dengan menggunakan metode *Passive Sampler* yang dilaksanakan dalam 2 (dua) periode dengan masing-masing periode pemanatauan dilaksanakan selama kurang lebih 14 hari.
2. Ketercapaian kinerja indikator sasaran meningkatnya indeks kualitas air pada tahun 2021-2024 sudah mencapai kategori Sangat Tinggi meskipun capaiannya fluktuatif, pada tahun 2021 mencapai 108.13% kemudian tahun 2022 turun menjadi 103.80% dan tahun 2023 naik menjadi 112,80% kemudian pada tahun 2024 turun kembali menjadi 101.55 %. Untuk mengukur indeks kualitas air, dilakukan pemantauan kualitas air di 2 (dua) Sungai besar di Kabupaten Pemalang yakni Sungai Comal dan Sungai Waluh di 3 (tiga) titik pantau yang mewakili kawasan hulu, tengah dan hilir sungai pada musim kemarau dan musim penghujan. Parameter kualitas air Sungai yang dipantau dan dianalisis meliputi Potential of Hydrogen (pH), Total Suspenden Solid (TSS), Dissolved Oxygen (DO), Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Nitrat, Total Fospat dan Fecal Coliform.
3. Ketercapaian kinerja 3 (tiga) indikator sasaran yakni persentase ketersediaan dokumen lingkungan dan kajian teknis lingkungan, persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina serta persentase penyelesaian kasus lingkungan sebagai berikut :
   a. Capaian indikator persentase ketersediaan dokumen lingkungan dan kajian teknis lingkungan pada tahun 2021-2023 mencapai 100% namun pada tahun 2024 turun menjadi 66,67%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup menargetkan penyusunan 3 (tiga) dokumen lingkungan dan kajian teknis

lingkungan yakni Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD), Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Dokumen IKLH), dan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pemalang, namun hanya 2 (dua) dokumen yakni DIKPLHD dan IKLH yang tersusun. Hal ini disebabkan karena penyusunan KLHS Review RTRW harus bersinergi atau bersamaan dengan penyusunan Dokumen Review RTRW yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pemalang.

b. Capaian indikator persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina pada tahun 2021-2024 mencapai 100 % (sangat tinggi) dan sudah mencapai target yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bupati/Walikota melalui pejabat/instansi teknis yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertugas dan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

c. Capaian indikator persentase penyelesaian kasus lingkungan pada tahun 2021-2024 mencapai 100 % (sangat tinggi) dan sudah mencapai target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa setiap aduan terhadap dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang selalu ditindaklanjuti.

4. Ketercapaian kinerja indikator sasaran persentase masyarakat yang aktif mengelola lingkungan tahun 2021-2024 mencapai 100 % (sangat tinggi) dan sudah mencapai target yang ditetapkan. Masyarakat yang aktif mengelola lingkungan ini dikategorikan menjadi beberapa kategori yakni masyarakat, kelompok masyarakat dan lembaga. Beberapa lembaga/kelompok masyarakat di Kabupaten Pemalang telah aktif melakukan upaya perlidungan dan pengelolaan lingkungan hidup diantaranya OPA Shabawana, P4S Bheger, Ecoenzym Pemalang, Sekolah Adiwiyata, Lintas Komunitas Penjaga Mata Air (Limata), Aliansi Masyarakat Taman Timur, Komunitas Peduli Kali Pemalang, dan komunitas/lembaga yang bergerak di bidang lingkungan hidup lainnya.

5. Ketercapaian kinerja 2 (dua) indikator sasaran yakni persentase penanganan lahan kritis dan persentase luasan ruang terbuka hijau (RTH) skala kabupaten sebagai berikut :

a. Capaian indikator persentase penanganan lahan kritis pada tahun 2021-2022 mencapai 100%, tetapi pada tahun 2023 dan tahun 2024 hanya mencapai 82.24 dan 0.23 %.

b. Capaian indikator persentase luasan ruang terbuka hijau (RTH) skala kabupaten pada tahun 2021-2022 mencapai 100 % dan pada tahun 2023-2024 mencapai 99,99%.

6. Ketercapaian kinerja 2 (dua) indikator sasaran yakni persentase penanganan sampah dan persentase pengurangan sampah sebagai berikut:
   a. Capaian indikator persentase penanganan sampah pada tahun 2021-2024 mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya timbulan sampah yang dihasilkan setiap tahunnya meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk sehingga sampah yang ditangani juga meningkat.

   b. Capaian indikator persentase pengurangan sampah pada tahun 2021-2024 mengalami fluktuatif. Capaian indikator persentase pengurangan sampah tersebut akan meningkat apabila ada peningkatan peran serta masyarakat/kelompok masyarakat/ Lembaga dalam pengurangan sampah dari sumbernya baik melalui upaya pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah di sumbernya dan pendauran ulang sampah disumber sampah.

7. Ketercapaian kinerja 2 (dua) indikator sasaran yakni Indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh dan Nilai SAKIP sebagai berikut :
   a. Capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh pada tahun 2021 telah mencapai target, namun pada tahun 2022-2024 tidak mencapai target. Indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh berkaitan dengan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup meliputi pengaduan dan penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, persetujuan lingkungan (persetujuan/penolakan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup/UKL-UPL), rekomendasi kelayakan dan ketidaklayakan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Pemberian persetujuan teknis pemenuhan baku mutu lingkungan hidup (air limbah dan/atau emisi), pengintegrasian rincian teknis penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun ke dalam persetujuan lingkungan, pengujian dan pengambilan sampel air (air permukaan dan air limbah) dan sampel udara (udara ambien), jasa kebersihan dan pengangkutan sampah, serta sedot tinja.

   b. Capaian indikator nilai SAKIP dari tahun 2021-2024 sudah tercapai dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Tabel 2.6. Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021-2024

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)				Persentase Realisasi Anggaran (%)			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	17,482,457,500	19,366,699,500	17,989,391,000	19,367,756,100	19,259,400,230	19,802,500,000	16,949,835,000	18,570,820,000	17,616,157,350	18,504,655,357	96.95%	95.89%	97.93%	95.54%
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	434,383,400	230,000,000	431,142,000	310,000,000	270,681,720	300,000,000	423,960,000	223,436,000	424,098,266	160,115,035	97.60%	97.15%	98.37%	51.65%
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	792,919,000	594,570,500	379,266,000	690,000,000	784,784,550	1,490,500,000	779,450,000	591,714,000	363,674,915	672,329,695	98.30%	99.52%	95.89%	97.44%
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	122,918,000	180,000,000	80,460,000	30,000,000	84,455,000	200,000,000	119,038,000	176,487,000	79,172,720	26,897,900	96.84%	98.05%	98.40%	89.66%
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Limbah (B3)	18,962,500	30,000,000	20,000,000	10,000,000	21,023,100	30,000,000	18,749,000	25,608,000	17,346,500	9,171,920	98.87%	85.36%	86.73%	91.72%
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan	74,567,200	160,000,000	56,350,000	150,000,000	14,167,500	595,000,000	74,556,200	159,710,000	56,332,775	136,727,725	99.99%	99.82%	99.97%	91.15%

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)				Persentase Realisasi Anggaran (%)			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)														
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	400,515,500	298,000,000	258,971,000	700,000,000	297,373,100	700,000,000	391,797,000	297,115,000	258,601,283	647,978,082	97.82%	99.70%	99.86%	92.57%
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	67,470,000	84,000,000	37,000,000	35,000,000	0	0	63,727,000	83,156,000	36,580,400	22,469,772	94.45%	99.00%	98.87%	64.20%
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	20,836,000	40,000,000	15,000,000	15,000,000	3,025,000	150,000,000	20,835,000	39,632,000	14,984,000	6,001,000	100.00%	99.08%	99.89%	40.01%
10	Program Pengelolaan Persampahan	8,333,746,900	6,108,448,000	17,026,795,000	7,720,826,900	9,327,422,000	26,970,000,000	8,319,572,000	6,068,958,000	15,417,997,181	7,175,179,747	99.83%	99.35%	90.55%	92.93%

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.1.4.Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang adalah seluruh masyarakat yang terkait dengan bidang lingkungan hidup dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam urusan lingkungan hidup. Kelompok sasaran layanan Dinas Lingkungan Hidup dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Masyarakat Kabupaten Pemalang;
   Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Salah satu pelayanan publik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat adalah pelayanan jasa kebersihan dan persampahan.
2. Pelaku usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Pemalang;
   Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu lingkungan (air limbah, udara emisi, rincian teknis limbah B3) yang harus dimiliki oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan.
3. Sekolah (SD/MI/SMP/MTs/SMA/MAN) dan akademisi/perguruan tinggi di Kabupaten Pemalang;
   Berkaitan dengan penerapan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait lingkungan hidup.
4. Perangkat Daerah/Instansi terkait pelaksanaan urusan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Pemalang.

2.1.5.Mitra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

Mitra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain :

1. Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia;
2. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia;
3. Kementerian Pekerjaan Umum;
4. Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana;
5. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Pemali Jratun;
6. Seksi Konservasi Wilayah II Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah;
7. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
8. Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara;
9. Perangkat Daerah di Kabupaten Pemalang antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas

https://jdih.pemalangkab.go.id

Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

10. Lurah/Kepala Desa di Kabupaten Pemalang;
11. Sekolah (SD/MI/SMP/MTs/SMA/MAN) dan Akademisi/Perguruan tinggi;
12. Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pemalang;
13. Pelaku usaha dan/atau kegiatan;
14. NGO/Kelompok Masyarakat/Komunitas Peduli Lingkungan Hidup.

2.1.6.Kerjasama Daerah

Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Kabupaten Tegal, Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antar wilayah Kabupaten serta kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pemalang denga PT Mountrash Avatar Indonesia dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah berbasih digital.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategi Perangkat Daerah

2.2.1.Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang selama lima tahun terakhir, beberapa permasalahan utama dapat diidentifikasi. Permasalahan tersebut menjadi fokus penting dalam meningkatkan kinerja pelayanan organisasi ke depan, yaitu :

Tabel 2.7. Pemetaan Permasalahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya stabilitas pengelolaan lingkungan hidup.	Kurangnya pengendalian lingkungan hidup pada Sektor air, udara dan tanah	• Belum optimalnya pengendalian pencemaran air permukaan • Belum optimalnya pencegahan kerusakan lingkungan • Belum optimalnya pengendalian emisi gas rumah kaca • Masih kurangnya pembinaan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan • Masih kurangnya sarana dan prasarana pemantauan dan

			pengujian kualitas air dan udara • Masih kurangnya koordinasi lintas sektor dalam pengendalian dan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan • Sarana penunjang pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang kurang memadai • Rendahnya komitmen pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan • Belum tersedianya TPA/TPST yang memadai • Terbatasnya sarana dan prasarana serta SDM dalam pengelolaan sampah Kurangnya pemahaman, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah situasi yang memiliki potensi menjadi tantangan atau peluang bagi suatu daerah di masa mendatang. Dalam konteks Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, isu-isu strategis berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang Lingkungan Hidup. Isu-isu ini mencerminkan aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian khusus untuk meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang serta mendukung pembangunan daerah yang lebih baik. Isu strategis tidak hanya mendasarkan pada hasil analisis data yang menggambarkan permasalahan yang dihadapi, tetapi juga dengan memperhatikan potensi, isu KLHS, global, nasional, regional dan daerah

Tabel 2.8. Rumusan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			ISU Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Kondisi demografi, geografi dan topografi Kabupaten Pemalang	Belum optimalnya pengendalian pencemaran air permukaan	Ancaman terhadap keberlanjutan kualitas dan kuantitas sumber daya air	Perubahan iklim	Penurunan kualitas lingkungan hidup	Pencemaran dan kerusakan lingkungan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

https://jdih.pemalangkab.go.id

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			ISU Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	Belum optimalnya pencegahan kerusakan lingkungan	Ancaman terhadap pelestarian tutupan hutan dan lahan	Pencemaran laut dan air	deplesi sumber daya alam	Meningkatnya timbulan sampah	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur persampahan.
	Belum optimalnya pengendalian emisi gas rumah kaca	Peningkatan ancaman risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim	Deforestasi	Risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim	Alih fungsi hutan dan degradasi sumber daya hutan/lahan	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
	Masih kurangnya pembinaan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan		Kehilangan keanekaragaman hayati		Kerusakan ekosistem wilayah pesisir dan laut	
	Masih kurangnya sarana dan prasarana pemantauan dan pengujian kualitas air dan udara		Penipisan lapisan ozon		Ancaman penurunan keanekaragaman hayati	
	Masih kurangnya koordinasi lintas sektor dalam pengendalian dan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan				Peningkatan Intensitas Kejadian bencana alam hidrometeorologis dan perubahan iklim	
	Sarana penunjang pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang kurang memadai					
	Rendahnya komitmen pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pelaksanaan pengelolaan					

https://jdih.pemalangkab.go.id

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			ISU Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	dan pemantauan lingkungan					
	Belum tersedianya TPA/TPST yang memadai					
	Terbatasnya sarana dan prasarana serta SDM dalam pengelolaan sampah					
	Kurangnya pemahaman, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah					

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Kepala Daerah terpilih telah ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 20 Februari 2025. Bupati dan Wakil Bupati memiliki periode masa jabatan 2025-2030. Visi Bupati dan Wakil Bupati adalah "**PEMALANG BERCAHAYA - BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA"**. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang berkontribusi pada **Misi 1 Resik**: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih. Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2025-2029).

Tujuan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut "**Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mendorong Konservasi serta pengendalian Kerusakan dan Pencemaran lingkungan hidup Kabupaten Pemalang**".

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

Sedangkan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Udara, Air dan Lahan yang terkelola
2. Meningkatnya Peran Masyarakat dengan mendorong terkelolanya sampah

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Ket.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mendorong Konservasi serta pengendalian Kerusakan dan Pencemaran lingkungan hidup Kabupaten Pemalang		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Indeks	66,81	76,78	76,82	76,87	76,91	76,95	77,00	
	Meningkatnya Kualitas Udara, Air dan Lahan yang terkelola	Indeks Kualitas Udara	Indeks	92,83	84,92	84,93	84,94	84,95	84,96	84,97	
		Indeks Kualitas Air	Indeks	48,33	75,85	75,95	76,05	76,15	76,25	76,35	
		Indeks Kualitas Lahan	Indeks	50,39	63,32	63,33	63,34	63,35	63,36	63,37	
	Meningkatnya Peran Masyarakat dengan mendorong terkelolanya sampah	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	%	85,97	86,47	86,97	87,47	87,97	88,47	88,97	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.2. Tahapan Rencana Strategis

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Produktif Sebagai Akselerator Pencapaian Tujuan Pembangunan	**Peningkatan Tata Kelola Kelembagaan Sebagai Pondasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Pemerataan Infrastruktur Pembangunan yang Ramah Lingkungan Menuju Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan**	**Pemantapan Produktivitas Ekonomi Daerah Menuju Perbaikan Kehidupan Masyarakat yang Adil dan Makmur**	**Perwujudan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan**
• Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM DLH dalam pengelolaan lingkungan. • Penguatan kelembagaan dalam pengelolaan sampah dan limbah.	• Penguatan sistem pengawasan dan pelaporan lingkungan. • Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik di bidang lingkungan.	• Penataan dan pengembangan ruang terbuka hijau (RTH). • Peningkatan pengelolaan TPA dan infrastruktur pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. • Penguatan program Kampung Iklim dan adaptasi perubahan iklim di masyarakat.	• Kolaborasi dengan pelaku usaha dalam pelestarian lingkungan. • Pemanfaatan potensi ekonomi sirkuler dari pengelolaan sampah.	• Konsolidasi seluruh program unggulan lingkungan hidup menuju pembangunan berkelanjutan. • Evaluasi menyeluruh dan penyusunan strategi lingkungan jangka panjang.

3.3. Strategi

Strategi merupakan serangkaian langkah yang memuat program-program indikatif sebagai upaya pencapaian visi dan misi. Sementara itu, kebijakan mencerminkan arah atau tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi dan kebijakan Dinas Perikanan menggambarkan cara pencapaian tujuan, sasaran jangka menengah, serta target kinerja hasil (outcome) dari program prioritas RPJMD Kabupaten Pemalang yang menjadi bagian dari tugas dan fungsi dinas tersebut. Rumusan strategi dan arah kebijakan ini mencerminkan rencana menyeluruh Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu lima tahun ke depan untuk meraih tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Pendekatan strategis yang menyeluruh ini juga berperan sebagai alat untuk mendorong transformasi, reformasi, serta peningkatan kinerja birokrasi.

Strategi yang akan dijalankan dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Udara, Air dan Tanah yang terkelola di Kabupaten Pemalang.

Strategi dalam mencapai sasaran ini adalah :

Pencapaian sasaran ini diarahkan melalui strategi pada peningkatan pengendalian dan pencegahan pencemaran udara, dan air. Melakukan pemeriksaan secara rutin kualitas udara terutama pada daerah padat lalu lintas dan padat industri. Menerapkan penghijauan dan tata kota

berkelanjutan. Mengembangkan dan mempertahankan daerah yang memiliki oksigen baik. Pada peningkatan kualitas air diarahkan pada pengendalian pencemaran sungai yang berasal dari limbah pabrik dan limbah industri. Peningkatan pemeriksaan kualitas air pada badan sungai yang merupakan keluaran dari limbah industri dan limbah domestik. Peningkatan kepemilikan sanitasi aman sehingga mampu mengurangi pencemaran air dengan mendorong kepemilikan jamban aman dan meningkatnya perilaku masyarakat untuk melakukan penyedotan tinja secara rutin dan meningkatnya pengelolaan limbah domestik terpadu (IPLT).

Sasaran 2. Meningkatnya Peran Masyarakat dengan mendorong terkelolanya sampah

Strategi dalam mencapai sasaran ini adalah :

Pengelolaan sampah diarahkan pada penanganan sampah rumah tangga, tanpa sampah (zero waste) di rumah tangga. Usaha ini dalam rangka mengurangi beban TPA. Pembentukan kelompok 3R dan meningkatkan kerjasama pada daerah yang memiliki RDF. Pengelolaan usaha yang memiliki prinsip ekonomi sirkuler. Pengelolaan TPST yang efektif. Meningkatkan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah dan penegakan Perda tentang Pengelolaan Sampah.

3.4. Arah Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai :

1. Menyusun dan memperbarui data keanekaragaman hayati secara berkala.
2. Melindungi habitat alami dan kawasan lindung dari alih fungsi lahan.
3. Mengembangkan taman keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau edukatif.
4. Melibatkan masyarakat dan komunitas dalam kegiatan pelestarian spesies lokal.
5. Mendorong integrasi konservasi keanekaragaman hayati dalam dokumen perencanaan daerah.
6. Melakukan pemantauan kualitas air, udara, dan tanah secara rutin dan menyeluruh.
7. Meningkatkan kapasitas laboratorium lingkungan untuk mendukung data ilmiah.
8. Penertiban dan pengawasan izin lingkungan serta penyimpanan limbah B3.
9. Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam pengendalian kerusakan lingkungan.
10. Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) sebagai dasar pengambilan kebijakan.
11. Mendorong pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
12. Perluasan cakupan pelayanan pengangkutan sampah di wilayah yang belum terlayani.

https://jdih.pemalangkab.go.id

13. Pengembangan infrastruktur persampahan seperti TPS 3R dan peningkatan kapasitas TPA.
14. Peningkatan kemitraan dengan swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
15. Penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah oleh pelaku usaha.
16. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan kinerja dan keuangan DLH.
17. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan pengaduan lingkungan.
18. Menyelenggarakan pengendalian internal dan evaluasi kinerja secara periodik.
19. Mengembangkan sistem informasi lingkungan yang terintegrasi dan mudah diakses publik.
20. Mendorong pelayanan publik berbasis digital untuk efisiensi dan kemudahan akses.

Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, difokuskan pada Percepatan penurunan emisi gas rumah kaca, Peningkatan pemantauan kualitas air dan udara dari zat pencemar yang dihasilkan oleh usaha industri;	1. Melakukan pemantauan kualitas air, udara, dan tanah secara rutin dan menyeluruh 2. Meningkatkan kapasitas laboratorium lingkungan untuk mendukung data ilmiah 3. Penertiban dan pengawasan izin lingkungan serta penyimpanan limbah B3 4. Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam pengendalian kerusakan lingkungan 5. Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) sebagai dasar pengambilan kebijakan 6. Mengembangkan taman keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau edukatif	

https://jdih.pemalangkab.go.id

			7. Menyusun dan memperbarui data keanekaragaman hayati secara berkala 8. Mendorong integrasi konservasi keanekaragaman hayati dalam dokumen perencanaan daerah 9. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan pengaduan lingkungan. 10. Mengembangkan sistem informasi lingkungan yang terintegrasi dan mudah diakses publik	
		1. Peningkatan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui optimalisasi pemanfaatan TPST	1. Mendorong pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle). 2. Perluasan cakupan pelayanan pengangkutan sampah di wilayah yang belum terlayani. 3. Pengembangan infrastruktur persampahan seperti TPS 3R dan peningkatan kapasitas TPA. 4. Peningkatan kemitraan dengan swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. 5. Penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah oleh pelaku usaha.	
		1. Peningkatan konservasi hutan dengan focus melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar taman hutan rakyat dalam menjaga kelestarian hutan;	1. Melibatkan masyarakat dan komunitas dalam kegiatan pelestarian spesies lokal. 2. Melindungi habitat alami dan kawasan lindung dari alih fungsi lahan.	
		1. Peningkatan kualitas pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan	1. Mendorong pelayanan publik berbasis digital untuk efisiensi dan kemudahan akses	

https://jdih.pemalangkab.go.id

		kepuasan pada masyarakat;		
		1. Peningkatan kualitas perencanaan daerah difokuskan pada transparansi, akuntabilitas perencanaan, dan sinergitas dok pusat dan provinsi;	1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan kinerja dan keuangan DLH 2. Menyelenggarakan pengendalian internal dan evaluasi kinerja secara periodik	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini difokuskan untuk penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup

Kegiatan: Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
- Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota
- Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH

Kegiatan: Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
- Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang

b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini difokuskan untuk pengukuran kualitas udara dan air sesuai bakuj mutu yang berlaku

Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
- Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
- Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
- Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota
- Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota
- Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota
- Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini difokudkan untuk melakukan pengukuran dan perbaikan indeks tutupan vegetasi yang menjadi kewenangan kabupaten

Kegiatan: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Program ini difokuskan untuk mengetahui perusahaan yang memiliki rintek/pertek pengolahan limbah.

Kegiatan: Penyimpanan sementara Limbah B3

Sub Kegiatan: Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3

e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini difokuskan pada pencegahan pelanggaran izin lingkungan yang tellah diterbitkan pemerintah kabupaten.

Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
- Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
- Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
- Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Layanan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini difokuskan pada pembinaan satuan pendidikan dan lembaga/komunitas dalam menjaga lingkungan hidup.

Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
- Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
- Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat.

https://jdih.pemalangkab.go.id

g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini difokuskan pada tindak lanjut dari pengaduan masyarakat terhadap terjadinya pencemaraan lingkungan hidup.
Kegiatan: Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan:

- Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
- Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup.

h. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini difokuskan pada pengelolaan sampah secara berkelanjutan mulai dari rumah sampai tempat pembuangan akhir

Kegiatan: Pengelolaan Sampah

Sub Kegiatan:

- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota
- Penanganan sampah melalui pengangkutan
- Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
- Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah
- Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
	Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah				Indeks Kualitas Air		
					Indeks Kualitas Udara		
					Indeks Kualitas Lahan		
		Meningkatnya hasil pengujian air, udara dan tanah			Kualitas Air Permukaan pada Parameter BOD		
					Kualitas Udara pada Konsentrasi SO2 dan NO2		
					Luas Tutupan Lahan		
		Meningkatnya pengelolaan sampah			Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah		
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat		
					% dokumen perencanaan LH yang disusun	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
						2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	
					Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	2.11.02.2.01.0004 Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota	
					Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan	2.11.02.2.01.0005 Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH	
						2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	
					Persentase data kualitas udara yang memenuhi baku mutu	**2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	
					Persentase data kualitas air yang memenuhi baku mutu		
						2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	2.11.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
					Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	2.11.03.2.01.0005 Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	
					Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	2.11.03.2.01.0007 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
					Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	2.11.03.2.01.0010 Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	2.11.03.2.01.0013 Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	
					Jumlah dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	2.11.03.2.01.0017 Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	
					Persentase tutupan Lahan pendukung Indeks Tutupan Vegetasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	**2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	
						2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	2.11.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2.11.04.2.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
					Persentase Keg/Usaha yang melakukan Pengelolaan Limbah B3	**2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	
						2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3	
					Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	2.11.05.2.01.0006 Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	**2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	
						2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	
					Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	2.11.06.2.01.0006 Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	
					Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	2.11.06.2.01.0007 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	2.11.06.2.01.0010 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
					Jumlah Sarana Prasarana yang Disediakan untuk Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan dan PPNS untuk Menunjang Kinerja Penegakan Hukum	2.11.06.2.01.0011 Layanan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup	
					Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	**2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
						2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
					Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	
					Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Persentase Pengaduan Masyarakat Terhadap Dugaan Pencemaran/ Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti	**2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	
						2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	2.11.10.2.01.0009 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	2.11.10.2.01.0012 Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup	
					Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	**2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	
						2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
					Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	2.11.11.2.01.0018 Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	
					jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan	2.11.11.2.01.0028 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TAG	DEFINISI OPERASIONAL	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
									TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah		Indeks Kualitas Air			Indeks													
		Indeks Kualitas Udara			Indeks													
		Indeks Kualitas Lahan			Indeks													
	Meningkatnya hasil pengujian air, udara dan tanah	Kualitas Air Permukaan pada Parameter BOD																
		Kualitas Udara pada Konsentrasi SO2 dan NO2																
		Luas Tutupan Lahan																
	Meningkatnya pengelolaan sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah			%													

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TAG	DEFINISI OPERASIONAL	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
									TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	**Indeks Kepuasan Masyarakat**			**Indeks**													
		bidang Penataan PEnaatan dan peningkatanKapasitas	**2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**% dokumen perencanaan LH yang disusun**				66,67	100	300,000,000	100	400,000,000	100	630,000,000	100	350,000,000	100	650,000,000
			2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	**% tersedianya Dokumen RPPLH**				100	100	200,000,000	100	400,000,000	100	630,000,000	100	350,000,000	100	400,000,000
			2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	["PERUBAHAN IKLIM"]	Pemda melakukan kajian telaahan terhadap RPPLH yang telah disusun untuk menjadi rujukan/rekomendasi dalam penyusunan kebijakan, rencana, proyek, program	2	2	200,000,000	2	250,000,000	2	300,000,000	2	350,000,000	2	400,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TAG	DEFINISI OPERASIONAL	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
									TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
							dan dokumen/kebijakan daerah lainnya sesuai dengan kewenangannya											
			2.11.02.2.01.0004 Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen	["PERUBAHAN IKLIM"]	Peninjauan kembali dokumen RPPLH dilakukan dalam rangka pembaharuan data, informasi dan/atau muatan rencana dalam dokumen RPPLH sesuai dengan perkembangan dan kondisi terbaru	0	0	-	1	150,000,000	1	300,000,000	0	-	0	-
			2.11.02.2.01.0005 Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan	Dokumen	[null]	pemda wajib menyusun dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst sebagai pelaksanaan arahan RPPLH	0	0	-	0	-	1	30,000,000	0	-	0	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TAG	DEFINISI OPERASIONAL	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
									TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	**Terselenggaranya Dokumen KLHS**				0	100	100.000.000	0	0	0	0	0	0	100	250,000,000
			2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	["PERUBAHAN IKLIM"]	Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD dimulai n-1 dan selesai sebelum Rancangan Awal RPJPD/RPJMD Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD terdiri dari : 1. Pembentukan Tim pembuat KLHS RPJPD/ RPJMD 2. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan 3. Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan 4. Penjaminan kualitas , pendokumentasian dan validasi KLHS RPJPD/RPJMD	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	250,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TAG	DEFINISI OPERASIONAL	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
									TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
							5. verifikasi pengintegrasian KLHS RPJPD/RPJMD ke dalam dokumen RPJPD/RPJMD											
			2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	[null]	Proses Penyelenggaraan KLHS terintegrasi dengan Rencana tata Ruang yang terdiri dari : 1. Pembuatan dan pelaksanaan 2. Penjaminan kualitas dan pendokumentasian dan 3. Pelaksanaan Validasi KLHS. Proses penyusunan KLHS terintegrasi dengan proses penyusunan Rencana Tata Ruang yang dimulai dari awal proses penyusunan sampai dengan penetapan RTR.	0	1	100,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TAG	DEFINISI OPERASIONAL	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
									TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase data kualitas udara yang memenuhi baku mutu**	**%**			50	54,17	1,490,500,000	58,33	3,950,000,000	62,50	4,668,180,000	66,67	900,000,000	70,83	1,490,500,000
				Persentase data kualitas air yang memenuhi baku mutu	**%**			50	52,08		54,17		56,25		58,33		60,42	
			2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan kerusakan LH**				100	100	1,490,500,000	100	3,950,000,000	100	4,668,180,000	100	900,000,000	100	1,490,500,000
			2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	["PERUBAHAN IKLIM"]	Melakukan uji kualitas lingkungan (udara, air, air laut, tutupan lahan). Yang akan di tinjut dengan penyusunan dokumen indikator kualitas lingkungan (IKLH & IKLHD)	2	2	150,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TAG	DEFINISI OPERASIONAL	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
									TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	["PERUBAHAN IKLIM"]	Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi untuk Inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dari sektor lingkungan hidup pada wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan, masyarakat, dan/atau yang menjadi kewenangan kabupaten/kota di tingkat kabupaten/kota untuk dilaporkan dalam Sistem Registrasi Nasional (SRN) PPI kabupaten/kota		1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TAG	DEFINISI OPERASIONAL	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
									TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			2.11.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Kegiatan	[null]	Segala bentuk kegiatan koordinasi dan sinkronisasi baik antara pemerintah Kabupaten/Kota dengan seluruh stakeholders terkait pencegahan dan pemantauan pencemaran lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara, dan laut	0	1	25,000,000	1	25,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TAG	DEFINISI OPERASIONAL	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
									TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			2.11.03.2.01.0005 Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	Dokumen	["PERUBAHAN IKLIM"]	Pelaksanaan inventarisasi GRK melalui: 1. Evaluasi terhadap hasil inventarisasi GRK tahun sebelumnya. 2. Identifikasi metodologi, ketersediaan data, termasuk lembaga-lembaga penyedia data. 3. Pengumpulan data aktivitas dan faktor emisi. 4. Perhitungan emisi/serapan GRK untuk setiap sektor oleh lembaga yang bertanggungjawab untuk melakukan perhitungan emisi/serapan GRK. 5. Analisis ketidakpastian untuk menilai tingkat akurasi dari emisi dugaan. 6. Analisis	1	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TAG	DEFINISI OPERASIONAL	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
									TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
							kategori kunci (sumber emisi/rosot utama). 7. Pengendalian dan penjaminan mutu. 8. Pelaporan Inventarisasi GRK.									

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TAG	DEFINISI OPERASIONAL	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
									TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			2.11.03.2.01.0007 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	[null]	Pemantauan pada badan air sungai/danau, udara ambien, tutupan lahan, Ekosistem Gambut dan Laut termasuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPALD di wilayah kabupaten/kota.	16	10	150,000,000	10	150,000,000	10	150,000,000	10	150,000,000	10	150,000,000
			2.11.03.2.01.0010 Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	Laporan	["PERUBAHAN IKLIM", "GEOPARK"]	1. Memilah kegiatan pembangunan yang tergolong aksi mitigasi perubahan iklim yang berdampak langsung dan tidak 2. Memastikan kesesuaian antara kegiatan pembangunan dengan kategori komponen aksi mitigasi perubahan 3. Menggolongkan kegiatan pembangunan	1	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TAG	DEFINISI OPERASIONAL	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
									TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
							ke dalam kelompok aksi mitigasi perubahan											
			2.11.03.2.01.0013 Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Unit	[null]	1. Pemasangan alat pemantauan kualitas secara terus menerus kualitas pada badan air 2. Pemasangan stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) 3. Pemantauan kualitas udara dengan cara manual	0	0	0	1	3,000,000,000	1	3,000,000,000	0	0	0	0
			2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen	["PERUBAHAN IKLIM"]	Pelaksanaan pengelolaan laboratorium lingkungan, pelaksanaan pengujian sampel dari instansi pemerintah bidang lingkungan hidup dan instansi lainnya yang dapat	156	200	865,500,000.00	250	225,000,000	300	918,180,000	350	250,000,000	400	250,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TAG	DEFINISI OPERASIONAL	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
									TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
							ditanggung oleh APBD dan sampel dari dunia industri/dunia usaha, pengujian kualitas udara dan uji kualitas lingkungan, operasional laboratorium, termasuk kegiatan untuk peningkatan mutu atau standarisasi laboratorium lingkungan											
			2.11.03.2.01.0017 Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Jumlah dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	[null]	Menyusun kebijakan dalam rangka untuk Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup termasuk rencana aksi daerah, dll	0	0	0	1	100,000,000	1	100,000,000	0	0	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TAG	DEFINISI OPERASIONAL	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
									TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Bidang pengendalian dan konsevasi lingkungan	**2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase tutupan Lahan pendukung Indeks Tutupan Vegetasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota**	**%**			100	43,096	200,000,000	43,101	200,000,000	43,110	200,000,000	43,115	200,000,000	43,120	200,000,000
			2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Persentase Pengelolaan Kehati**					100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000
			2.11.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen	["PERUBAHAN IKLIM"]	Seluruh kegiatan yang terkait dengan penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan Kehati	1	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000
			2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	["PERUBAHAN IKLIM"]	Seluruh kegiatan yang terkait dengan Pengelolaan RTH	48,042	48,053	100,000,000	48,058	100,000,000	48,063	100,000,000	48,068	100,000,000	48,073	100,000,000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TAG	DEFINISI OPERASIONAL	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
									TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			2.11.04.2.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang	[null]	Seluruh kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait pengelolaan keanekaragaman hayati											
		Pengendalian konservasi	**2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase Keg/Usaha yang melakukan Pengelolaan Limbah B3**	**%**			20	25	30,000,000	30	30,000,000	35	30,000,000	40	30,000,000	45	30,000,000
			2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3	**Persentase Pengendalian B3 & LB3**				100	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000
			2.11.05.2.01.0006 Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	Usaha	[null]	Melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	14	15	30,000,000	17	30,000,000	18	30,000,000	19	30,000,000	20	30,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TAG	DEFINISI OPERASIONAL	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
									TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Penataan	**2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota**	**%**			68	65	595,000,000	65	700,000,000	65	650,000,000	65	700,000,000	65	700,000,000
			2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase kegiatan usaha yang diawasi dan dibina**				100	100	595,000,000	100	700,000,000	100	650,000,000	100	700,000,000	100	700,000,000
			2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	[null]	Jumlah fasilitasi rekomendasi/persetujuan/izin lingkungan, persetujuan teknis dan surat kelayakan operasi yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan	0	10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TAG	DEFINISI OPERASIONAL	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
									TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
							perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik											
			2.11.06.2.01.0006 Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Orang	["PERUBAHAN IKLIM"]	Pendidikan, pelatihan dan pelantikan kepada PNS untuk menjadi pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup daerah yang bertugas mengawasi seluruh badan usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota serta pengawasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	0	5	175,000,000	5	175,000,000	5	175,000,000	5	175,000,000	5	175,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TAG	DEFINISI OPERASIONAL	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
									TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			2.11.06.2.01.0007 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	[null]	PPLHD ditingkatkan kapasitasnya untuk dapat memenuhi standar kompetensi pengawasan ketaatan yang akan dilakukan, yang mencakup aspek pengawasan yang terdiri dari: Persetujuan Lingkungan (Dokumen Lingkungan), Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan B3, Pengelolaan Sampah dan Limbah Non B3, Pemanfaatan Teknologi yang mendukung kegiatan pengawasan dan Teknis Pengambilan Sampel Limbah)	0	3	150,000,000	3	150,000,000	3	150,000,000	3	150,000,000	3	150,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TAG	DEFINISI OPERASIONAL	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
									TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			2.11.06.2.01.0010 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Usaha/ Kegiatan	[null]	Pelaksanaan pengawasan ketaatan kewajiban dalam Persetujuan Lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan oleh usaha dan/atau kegiatan termasuk Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan B3, Pengelolaan Sampah dan Limbah Non B3	25	20	20,000,000	25	25,000,000	25	25,000,000	25	25,000,000	25	25,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TAG	DEFINISI OPERASIONAL	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
									TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			2.11.06.2.01.0011 Layanan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Sarana Prasarana yang Disediakan untuk Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan dan PPNS untuk Menunjang Kinerja Penegakan Hukum	Unit	[null]	Sarana prasarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai suatu maksud dan tujuan. Dalam hal ini sarana prasarana yang dibutuhkan Aparat Penegak Hukum Lingkungan Hidup adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat Penegak Hukum Lingkungan Hidup (PPLH, PPNS, PEDAL) untuk melaksanakan tugas pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup. Contoh Sarana prasarana tersebut antara	0	2	150,000,000	2	250,000,000	3	200,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TAG	DEFINISI OPERASIONAL	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
									TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
							lain alat komputerisasi, alat dokumentasi, alat pelindung diri, alat transportasi, sarana prasarana pengambil contoh uji kualitas lingkungan, dan fasilitas pengujian contoh uji kualitas lingkungan.													
		PEnataan	**2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup**	**unit**			48	50	700,000,000	55	850,000,000	58	850,000,000	60	850,000,000	62	850,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TAG	DEFINISI OPERASIONAL	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
									TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase kelompok masyarakat yang teredukasi**				100	100	700,000,000	100	850,000,000	100	850,000,000	100	850,000,000	100	850,000,000
			2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	[null]	Upaya Pengembangan Generasi Lingkungan (PGL) yang merupakan upaya penumbuhan dan peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku untuk peduli dan berbudaya lingkungan dengan ciri utama kelestarian, keberlanjutan melalui pendampingan,	0	6	150,000,000	10	250,000,000	10	250,000,000	10	250,000,000	10	250,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TAG	DEFINISI OPERASIONAL	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
									TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
							penyuluhan, pemagangan, pembentukan dan pemberdayaan kader.											
			2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Orang	["PERUBAHAN IKLIM"]	Pelaksanaan berbagai kegiatan Penyuluhan dan Kampanye terkait PPLH	0	150	200,000,000	150	200,000,000	150	200,000,000	150	200,000,000	150	200,000,000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TAG	DEFINISI OPERASIONAL	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
									TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembaga	["GEOPARK"]	Peningkatan kapasitas dan kompetensi bidang lingkungan hidup yaitu Pengembangan Generasi Lingkungan (PGL) yang merupakan upaya penumbuhan dan peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku untuk peduli dan berbudaya lingkungan dengan ciri utama kelestarian dan keberlanjutan. Jumlah lembaga masyarakat/komunitas serta Generasi Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dihitung pada tahun berjalan yaitu telah memenuhi kriteria umum	6	6	350,000,000	10	400,000,000	10	400,000,000	10	400,000,000	10	400,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TAG	DEFINISI OPERASIONAL	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
									TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
							dan khusus sasaran PGL											
		PEnataan	**2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Pengaduan Masyarakat Terhadap Dugaan Pencemaran/ Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti**	**%**			100	100	150,000,000	100	170,000,000	100	190,000,000	100	210,000,000	100	230,000,000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TAG	DEFINISI OPERASIONAL	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
									TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	**Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti (%)**				100	100	150,000,000	100	170,000,000	100	190,000,000	100	210,000,000	100	230,000,000
			2.11.10.2.01.0009 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	Pengaduan	[null]	Pelaksanaan pengelolaan Pengaduan baik oleh Perseorangan maupun Badan Usaha yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, yang dimulai dari tahapan penerimaan pengaduan, penelaahan, registrasi, verifikasi administrasi dan lapangan serta rekomendasi tindak lanjut	0	10	100,000,000	12	120,000,000	14	140,000,000	16	160,000,000	18	180,000,000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TAG	DEFINISI OPERASIONAL	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
									TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			2.11.10.2.01.0012 Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup	Jumlah PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	[null]	1. Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara terencana oleh Pusdiklat Polri guna membentuk dan mengambangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan calon PPNS menjadi PPNS untuk selanjutnya dilantik oleh KemenkumHAM.	0	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000
		PEngendalian	**2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah**	**%**			26,51	32,81	26,970,000,000	35,82	29,720,000,000	38,83	32,220,000,000	41,84	34,720,000,000	44,85	37,370,000,000
			2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	**Persentase sampah yang dikelola**					86,47	26,970,000,000	86,97	29,720,000,000	87,97	32,220,000,000	88,47	34,720,000,000	88,97	37,370,000,000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TAG	DEFINISI OPERASIONAL	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
									TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	["PERUBAHAN IKLIM"]	pelaksanaan peningkatan pemahaman, kesadaran, kepedulian, dan peran aktif masyarakat dan para pihak lainnya dalam pengelolaan sampah melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, penyuluhan, pengawasan, pembinaan dan pemantauan terhadap masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya	11	11	400,000,000	11	400,000,000	11	400,000,000	11	400,000,000	11	400,000,000
			2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	[null]	Seluruh proses penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	2	2	3,100,000,000	2	3,100,000,000	2	3,100,000,000	2	3,100,000,000	2	3,100,000,000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TAG	DEFINISI OPERASIONAL	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
									TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	["PERUBAHAN IKLIM"]	Seluruh kegiatan terkait penyusunan kebijakan, strategi dan rencana pengelolaan sampah hingga ditetapkan oleh kabupaten/kota	1	1	420,000,000	1	420,000,000	1	420,000,000	1	420,000,000	1	420,000,000
			2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	["PERUBAHAN IKLIM"]	Melakukan penanganan sampah melalui pengangkutan sampah	76068 TON	75000 TON	Rp 6,500,000,000.00	65000 TON	Rp 6,750,000,000.00	65000 TON	Rp 6,750,000,000.00	65000 TON	Rp 6,750,000,000.00	60000 TON	Rp 6,900,000,000.00
			2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton	["PERUBAHAN IKLIM"]	Seluruh kegiatan (baik mulai dari rencana, kebijakan, monitoring, pencatatan, dan evaluasi) untuk penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah	0	2880	1,500,000,000	2900	2,000,000,000	2950	2,500,000,000	3000	3,000,000,000	3200	3,500,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TAG	DEFINISI OPERASIONAL	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
									TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
							dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan											
			2.11.11.2.01.0018 Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Laporan	["PERUBAHAN IKLIM"]	Semua kegiatan untuk mendorong pelaksanaan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah (baik dilakukan melalui penyusunan kebijakan, penyuluhan, pencatatan, dan monitoring serta evaluasi)	0	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TAG	DEFINISI OPERASIONAL	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
									TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Tahun 2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	["PERUBAHAN IKLIM"]	Semua kegiatan terkait pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	0	54000	10,000,000,000	55000	11,000,000,000	56000	12,000,000,000	57000	13,000,000,000	58000	14,000,000,000
			2.11.11.2.01.0028 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan	Unit	[null]	Seluruh proses penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan,	0	5	5,000,000,000	6	6,000,000,000	7	7,000,000,000	8	8,000,000,000	9	9,000,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id

Berikut ini program prioritas dan program unggulan daerah dalam lima tahun ke depan:

Tabel 4.3.
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tercapainya Perencanaan Lingkungan Hidup	Kegiatan: Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: • Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota • Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota • Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH	
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kegiatan: Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: • Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut • Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim • Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan	

			Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut • Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK • Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut • Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota • Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota • Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota • Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Kegiatan: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: • Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati • Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin	Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin	

	Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: • Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH • Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
5	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Meningkatnya Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Kegiatan: Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan: • Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup • Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	
6	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Kegiatan: Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan: • Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan • Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di	

			TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota • Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota • Penanganan sampah melalui pengangkutan • Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan • Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah • Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional • Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

a. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur strategis yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam mendukung pembangunan daerah. IKU mencerminkan capaian hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program prioritas yang berkontribusi langsung terhadap visi dan misi kepala daerah.

Penyusunan IKU dilakukan secara terintegrasi dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti RPJMD dan Rencana Pembangunan Nasional. IKU disusun dengan prinsip SMART (*Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*) sehingga dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan program, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi kinerja. Berikut adalah indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	66,81	76,78	76,82	76,87	76,91	76,95	77,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

b. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran utama yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang selama periode perencanaan. IKK disusun secara terukur, relevan, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang. Berikut adalah indikator kinerja kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Indeks	66,81	76,78	76,82	76,87	76,91	76,95	77,00	
2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	%	85,97	86,47	86,97	87,47	87,97	88,47	88,97	
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	68	65	65	65	65	65	65	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program perangkat daerah dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 untuk mewujudkan masyarakat PEMALANG BERCAHAYA-BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang merupakan perencanaan pembangunan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Pemalang periode Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026 dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mendorong Konservasi serta pengendalian Kerusakan dan Pencemaran lingkungan hidup Kabupaten Pemalang

Masa berlaku Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah selama 5 (lima) tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, maka Renstra Tahun 2025–2029 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tahun 2030. Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan dalam perencanaan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan Renja setelah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang berakhir. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan daerah maka pedoman transisi ditetapkan bahwa penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2030 dengan mengacu pada arah kebijakan Renstra, RPJMD Kabupaten Pemalang, arah kebijakan dan sasaran pokok dari RPJPD Kabupaten Pemalang (yang baru).

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan kaidah pelaksanaan bermakna sebagai pedoman dalam pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas pendanaan dan waktu pelaksanaan pembangunan daerah. Penyelenggaraan pembangunan daerah merupakan perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik. Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Renstra tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD, yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD;
2. Indikator dan target kinerja pembangunan daerah yang tercantum dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 – 2029 wajib dipenuhi untuk mendukung tercapainya kinerja Pemerintah Kabupaten Pemalang;

3. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
4. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala; dan
6. Apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi Renstra maka akan dilakukan penyesuaian.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian evaluasi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 bertujuan untuk memastikan pencapaian target program dan kegiatan, memastikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan, menilai pencapaian kinerja serta mengendalikan risiko strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Pelaksanaan pengendalian dilakukan minimal 1 (satu) kali selama periode 5 tahun (periode Renstra).

Upaya untuk mencapai suatu harapan tentunya tidak selalu berjalan mulus, berbagai kendala mungkin akan menghadang perjalanan pembangunan lingkungan hidup selama kurun lima tahun mendatang. Berbagai kendala akan dipandang sebagai tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan dengan arif dan penuh pertimbangan untuk kebaikan semua pihak. Demikianlah semoga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029 yang telah tersusun ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai pedoman semua pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemalang, 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG

WIJI MULYATI, S.K.M
Pembina Tk. I
NIP. 19700131 199303 2 003

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029 merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan. Dokumen ini disusun sebagai panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta sebagai bentuk sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah provinsi dalam mendukung pembangunan sektor pertanian dan perikanan di Kabupaten Pemalang.

Landasan hukum penyusunan Renstra ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan pentingnya dokumen perencanaan pembangunan terintegrasi untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Selain itu, Renstra juga berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan, bahwa setiap daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, maupun jangka pendek (1 tahun) berupa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana Perangkat Daerah dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus mengacu pada dokumen perencanaan diatasnya yaitu RPJPD dan RPJMD, RPJMD Provinsi, serta RPJM Nasional. Selain itu, Renstra Perangkat Daerah juga memperhatikan Renstra K/L.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan bagian penting

https://jdih.pemalangkab.go.id

dalam proses perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Renstra menjadi acuan utama bagi perangkat daerah dalam merumuskan arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama lima tahun ke depan guna mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Gambar 1.1.

Keterkaitan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Sektor Lainnya

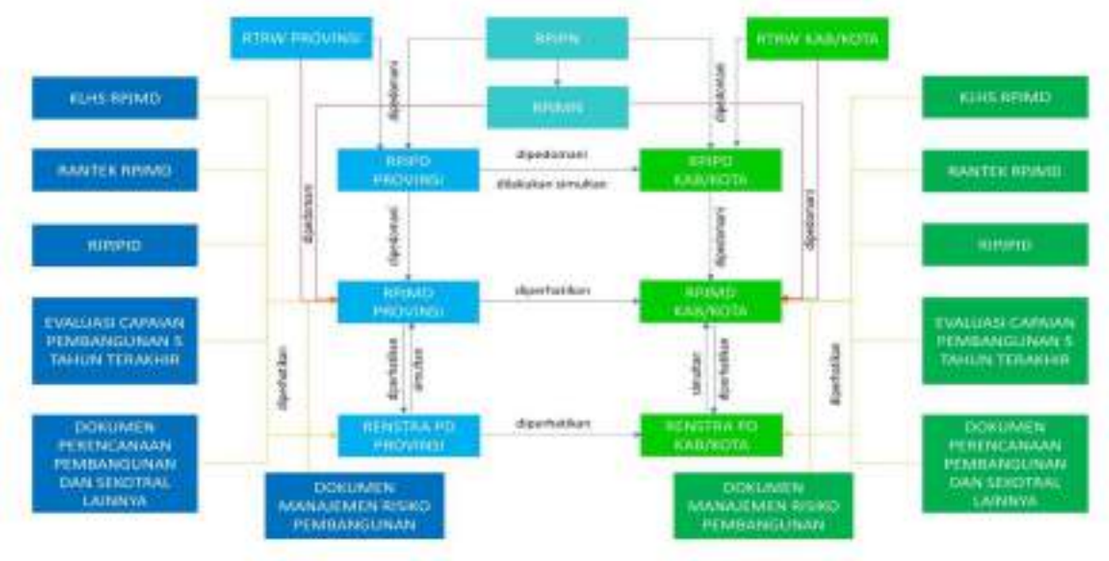

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, Renstra Perangkat Daerah didefinisikan sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah serta mengacu pada RPJMD. Dokumen ini menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, serta menjadi alat untuk mengukur capaian kinerja instansi selama periode perencanaan.

Penyusunan renstra ini secara sistematis dan berkesinambungan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul serta dimaksudkan sebagai arah dan pedoman pembangunan pertanian dan perikanan Kabupaten Pemalang, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dan terukur. Sedangkan arah pembangunan ini dilaksanakan dalam upaya peningkatan produksi, produktivitas, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur pertanian dan perikanan serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani-nelayan dan keluarganya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dalam konsep pembangunan pertanian-perikanan yang mandiri dan berkelanjutan. Faktor pendukungnya adalah kesiapan sumber daya,

https://jdih.pemalangkab.go.id

tertatanya kelembagaan, berkembangnya inovasi teknologi tepat guna dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai.

Proses penyusunan Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu persiapan penyusunan Renstra PD, penyusunan rancangan Renstra PD, penyusunan rancangan akhir Renstra PD dan penetapan Renstra PD. Proses penyusunan Renstra ini dilakukan dengan mengikuti bagan alir tahapan penyusunan Renstra PD Provinsi seperti yang digambarkan di bawah ini :

Gambar 1.2.
Pentahapan Penyusunan Renstra

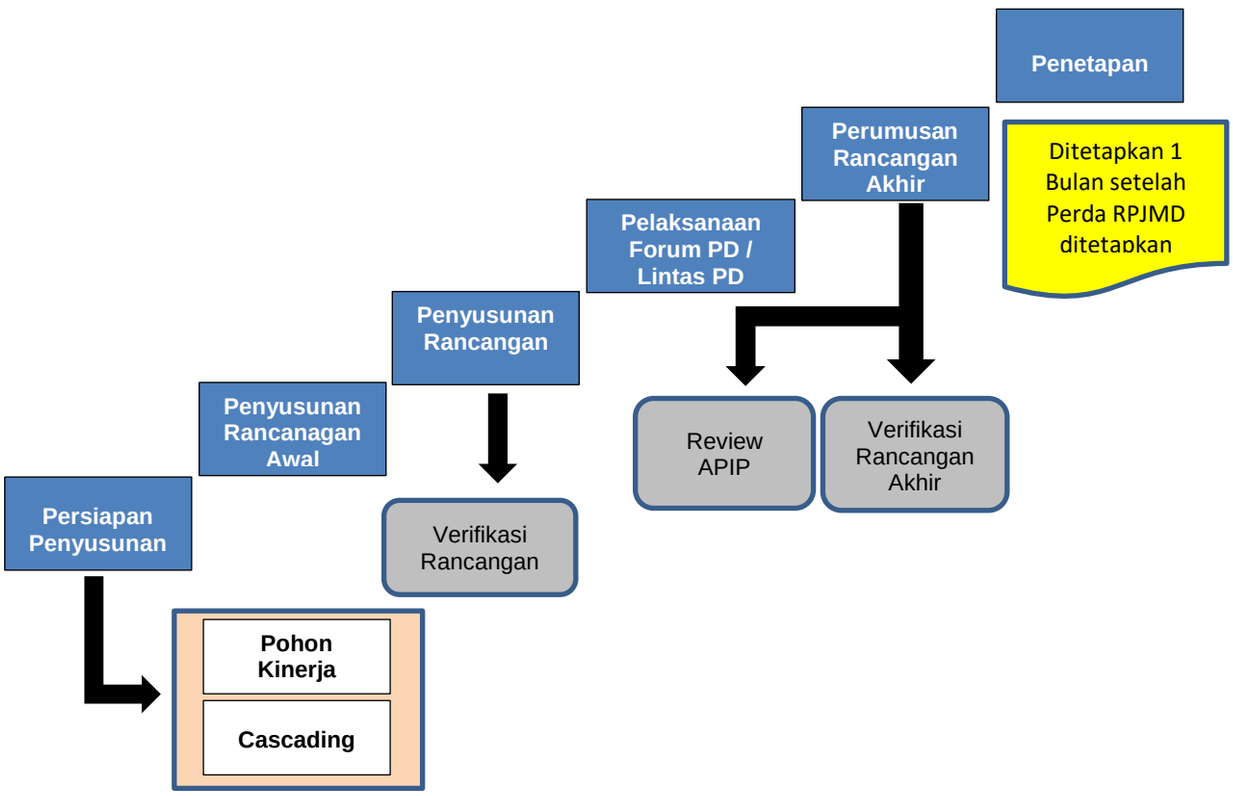

Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra PD sangat menentukan kualitas dokumen Renstra PD yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra PD adalah Rancangan Awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh PD selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi Kepala Daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi PD terkait.

Untuk penyusunan rancangan Renstra PD Kabupaten/Kota, dilakukan review Renstra K/L dan Renstra PD provinsi, yang mencakup tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L, program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas, tujuan

https://jdih.pemalangkab.go.id

dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra PD Kabupaten/Kota, dan program prioritas PD Kabupaten/Kota dan target kinerja serta lokasi program prioritas.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

https://jdih.pemalangkab.go.id

10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
16. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
17. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

https://jdih.pemalangkab.go.id

20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 208);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 110);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
26. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
27. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Dae rah Tahun 2025-2029;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 144);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);

https://jdih.pemalangkab.go.id

38. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Pertanian Organik (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 7);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 10);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029;
46. Peraturan Bupati Kabupaten Pemalan Kabupaten Pemalang Nomor 142 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Budidaya Ikan Air Tawar pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 142);
47. Peraturan Bupati Kabupaten Pemalan Kabupaten Pemalang Nomor 143 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelelangan Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 143);
48. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 83, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang);

https://jdih.pemalangkab.go.id

49. Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Pertanian Organik (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);
50. Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor ..... Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan dalam mewujudkan Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah.
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan unsur penunjang bidang pertanian, pangan dan perikanan.
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang.
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

1.1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari

https://jdih.pemalangkab.go.id

disusunnya Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasikan dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 serta disusun sesuai kaidah penyusunan produk hukum.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggungjawab Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Menyajikan tugas, fungsi dan struktur Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang.

2.1.2. Sumber daya Perangkat Daerah

Menyajikan data-data dan informasi sumber daya Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang yang meliputi potensi pertanian, pangan, perikanan sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menyajikan data-data dan informasi pelayanan yang menjadi urusan dan tanggung jawab Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Mengidentifikasikan masyarakat yang terlibat dalam urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan dan perikanan.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Mengidentifikasikan Perangkat Daerah yang terlibat dalam rangka meningkatkan kemudahan dan kecepatan didalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Mengidentifikasikan permasalahan dan isu strategis yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang.

2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah

Mengidentifikasikan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang

2.2.2. Isu Strategis

Mengidentifikasikan isu strategis sesuai lingkungan dinamis yang dapat mempengaruhi pertanian, pangan dan perikanan di Kabupaten Pemalang baik secara langsung maupun tidak langsung

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menyajikan tujuan, sasaran dan arah kebijakan Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Menentukan tujuan Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Menentukan sasaran Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat

https://jdih.pemalangkab.go.id

3.3. Strategi Perangkat Daerah

Menentukan strategi Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang berisi tindakan yang komprehensif yang akan dilakukan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Menyajikan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menyajikan program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan pertanian, urusan pangan dan urusan perikanan

4.1. Uraian program, kegiatan dan subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Menyajikan program, kegiatan dan subkegiatan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output.

4.2. Uraian subkegiatan dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah

Menyajikan uraian subkegiatan prioritas yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi pedoman pembangunan daerah dan dapat diterjemahkan menjadi aksi-aksi nyata yang dapat diimplementasikan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang.

4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Menyajikan indikator kinerja utama atau IKU Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta menjadikan IKU tersebut sebagai prioritas utama

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Menyajikan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang.

BAB V. PENUTUP

Menyajikan kesimpulan penting subtansial, kaidah pelaksanaan serta pelaksanaan pengendalian evaluasi

5.1. Kesimpulan Penting Subtansial

Menyajikan kesimpulan penting substansial Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Menyajikan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

5.3. Pelaksanaan Pengendalian Evaluasi

Menyajikan Pelaksanaan pengendalian evaluasi Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 bertujuan untuk memastikan pencapaian target program dan kegiatan, menilai kinerja serta mengendalikan risiko strategis Urusan Pertanian, Urusan Pangan dan Urusan Perikanan di Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Bupati Pemalang Nomor ..... Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, salah satu lembaga teknis pada perda tersebut adalah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan. Adapun tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

   Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, bidang pangan dan bidang perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2. Fungsi

   Adapun Fungsi dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan adalah :

   a. perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, prasarana pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta bidang pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, prasarana pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta bidang pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
   c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, prasarana pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta bidang pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
   d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

https://jdih.pemalangkab.go.id

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Sedangkan Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; Kabupaten Pemalang sesuai Peraturan Bupati Pemalang Nomor ..... Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang perikanan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)).
- Merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).
- Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang perikanan.
- Mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, prasarana pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta bidang pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
- Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang perikanan.
- Mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang perikanan sesuai dengan unsur SPIP.
- Mengarahkan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang pertanian, bidang pangan dan bidang perikanan.
- Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang perikanan.
- Merumuskan inovasi daerah urusan pemerintahan bidang

https://jdih.pemalangkab.go.id

pertanian, bidang pangan dan bidang perikanan.

- Merumuskan laporan di bidang pertanian, bidang pangan dan bidang perikanan.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sekretaris, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan.
- Mengoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan.
- Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengelolaan dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kedinasan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kerjasama, kehumasan, kearsipan, dokumentasi dan pengadaan barang/jasa.
- Menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik.
- Menyusun konsep inovasi kesekretariatan.
- Mengoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang-bidang.
- Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Membawahi langsung :

a. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan, mempunyai uraian tugas :
    - Merencanakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan.
    - Menyusun usulan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta dokumen perencanaan lainnya.
    - Melaksanakan pengelolaan administrasi bina program dan keuangan.
    - Mengelola data urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang perikanan.
    - Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran.

https://jdih.pemalangkab.go.id

- Menyusun konsep dokumen pertanggungjawaban kinerja yang meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dokumen pertanggungjawaban lainnya.
- Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (calk), serta laporan keuangan lainnya.
- Menyiapkan bahan inovasi pada Subbagian Bina Program dan Keuangan.
- Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang perikanan sesuai dengan unsur SPIP.
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Bina Program dan Keuangan.
- Menyusun bahan laporan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang perikanan.
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Bina Program dan Keuangan.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
   - Merencanakan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
   - Mengelola administrasi barang milik daerah meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pengamanan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, penatausahaan, pemanfaatan dan penyusunan laporan barang milik daerah
   - Mengelola administrasi umum meliputi surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan.
   - Mengelola administrasi kehumasan meliputi keprotokolan dan informasi publik.
   - Mengelola administrasi kerumahtanggaan meliputi pengadaan, penyediaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan jasa penunjang, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas.
   - Mengelola administrasi kepegawaian.

https://jdih.pemalangkab.go.id

- Mengelola ketatalaksanaan meliputi penyusunan sistem dan prosedur kerja.
- Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik.
- Menyiapkan bahan inovasi Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

c. Kepala Bidang Ketahanan Pangan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Merencanakan program dan kegiatan bidang ketahanan pangan.
- Menyusun rancangan kebijakan bidang ketahanan pangan.
- Merumuskan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan.
- Menyelenggarakan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota, meliputi : penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya, koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur logistik, penyediaan infrastruktur cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota
- Menyelenggarakan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, meliputi: penyediaanpangan berbasis sumber daya lokal; koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya; pengembangan kelembagaan usaha pangan peningkatan ketahanan pangan keluarga; stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di kabupaten/kota; pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal; pengembangan kelembagaan distribusi pangan kabupaten/kota; pemantauan stok pangan; penyediaan informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kabupaten/kota; penyusunan prognosa neraca pangan wilayah kabupaten/kota; koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan dan harga pangan pokok strategis; pemantauan harga dan pasokan pangan; penyusunan neraca bahan makanan (nbm);

https://jdih.pemalangkab.go.id

- Menyelenggarakan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota, meliputi : penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal; pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota; pemeliharaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota; penyaluran cadangan pangan pemerintah kab/kota; pengelolaan cadangan pangan pemerintah kab/kota.
- Menyelenggarakan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, meliputi : penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun; pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.; koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun.
- Menyelenggarakan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota, antara lain : penyusunan kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota melalui peraturan kabupaten/kota.
- Menyelenggarakan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, antara lain : penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan.
- Menyelenggarakan penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota, meliputi : pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota; pelaksanaan intervensi kewaspadaan pangan dan gizi; penyusunan peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi kabupaten/kota.
- Menyelenggarakan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota, meliputi : rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota; rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; penyediaan sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota; koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan; penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

- Menyelenggarakan pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro, antara lain : pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro.
- Menyusun konsep inovasi bidang ketahanan pangan.
- Melaksanakan pengelolaan resiko operasional atas kegiatan yang dilaksanakan.
- Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada bidang ketahanan pangan.
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada bidang ketahanan pangan.
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada bidang ketahanan pangan.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Merencanakan program dan kegiatan Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan sesuai dengan dokumen perencanaan.
- Menyusun rancangan kebijakan Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.
- Merumuskan kebijakan teknis di Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.
- Menyelenggarakan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, Meliputi : Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman, Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman dan Penjaminan Kemurnian Dan Kelestarian SDG Hewan.
- Menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota, meliputi : Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil dan Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak.
- Menyelenggarakan kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer, meliputi : Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan dan Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan.
- Menyelenggarakan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota, meliputi : Pengujian Mutu Benih dan Bibit

https://jdih.pemalangkab.go.id

Ternak, Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan, Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan, Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak, Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak serta Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak.

- Menyelenggarakan kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain, meliputi : Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain, Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain dan Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain.
- Menyelenggarakan kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota, meliputi : Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular; Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis; Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan; Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan; Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis; Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Menyelenggarakan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi : Pengawasan Atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM), Pengawasan Peredaran Produk Hewan, Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM dan Analisis Risiko Penyakit Hewan, Zoonosis, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya.
- Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota, meliputi : penyediaan pelayanan jasa laboratorium dan penyediaan pelayanan jasa medik veteriner.

https://jdih.pemalangkab.go.id

- Menyelenggarakan kegiatan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, meliputi : pengawasan peredaran hewan dan produk hewan; pengujian laboratorium kesehatan masyarakat veteriner; pembinaan penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan; pengelolaan penerbitan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran, sertifikat veteriner, dan SKKH/SKPH hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya (HPM); pengembangan kompetensi petugas teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejehteraan hewan; peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan; pembinaan dan pendampingan pemenuhan persyaratan registrasi produk hewan segar berkemasan; dan pengawasan unit usaha produk hewan.
- Menyelenggarakan kegiatan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, meliputi: penanganan atas pelanggaran kesejahteraan hewan sesuai kewenangannya dan pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha.
- Menyelenggarakan kegiatan penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan, meliputi : penatausahaan penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan; pengawasan pelaksanaan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan; pengawasan pelaksanaan izin usaha fasilitas pemeliharaan hewan; pengawasan pelaksanaan izin usaha rumah potong hewan; dan pengawasan pelaksanaan izin usaha rumah sakit hewan, klinik hewan, ambulatori, praktik dokter hewan mandiri/puskeswan mandiri, tempat pelayanan paramedik veteriner, atau pasar hewan.
- Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan, meliputi: fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin usaha pengecer obat hewan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pengecer obat hewan.
- Menyusun konsep inovasi pada Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.
- Melaksanakan pengelolaan resiko operasional atas kegiatan yang dilaksanakan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

- Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Merencanakan program dan kegiatan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan dokumen perencanaan.
- Menyusun rancangan kebijakan Bidang Peternakan dan kesehatan hewan.
- Merumuskan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- Menyelenggarakan fasilitasi produksi ternak yang meliputi penetapankawasan peternakan, peta potensi peternakan, pengembangan hijaupakan ternak, penetapan padang penggembalaan dan bimbingan penetapan kawasan peternakan; bimbingan teknis pembibitan ternak dan produksi ternak; pelatihan inseminasi buatan, pencatatan administrasi dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan; bimbingan budidaya ternak, seleksi ternak bibit, registrasi ternakbibit, penerapan standar pembibitan dan pengawasan mutu bibit;bimbingan produksi pakan ternak, penerapan teknologi pakan ternak,standar mutu pakan ternak dan pengawasan peredaran pakan ternak;pengembangan informasi peternakan melalui pengumpulan,pengolahan, dan analisis data peternakan; pengembangan sumberdaya genetik (SDG) hewan; serta bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan.
- Menyelenggarakan pengelolaan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner yang meliputi bimbingan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, penerapan teknologi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; pemberian perizinan/rekomendasi (izin praktek dokter hewan, izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet, izin usaha obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, poultry shop dan pet shop, pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan, surat

https://jdih.pemalangkab.go.id

keterangan kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak), merekomendasi instalasi karantina hewan, bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan, bimbingan pelaksanaan penerapan Nomor Kontrol Veteriver (NKV); pengembangan obat hewan mencakup identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan,penerapan mutu obat hewan dan pengawasan penggunaan obat hewan; pengawasan lalu lintas produk ternak; penutupan wilayah penyakit hewan menular sesuai petunjuk teknis; penanggulangan penyakit hewan akibat bencana alam guna mencegah terjadinya penularan zoonosis; serta bimbingan pelaporan dan pendataan penvakit individual/menular pada hewan yang mewabah.

- Menyelenggarakan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan yang meliputi bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis, pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan, pengawasan penyaluran dan pemanfaatan kredit usaha; inventarisasi budidaya peternakan, budidaya hewan kesayangan, pembuatan/peredaran alatdan mesin peternakan, rumah potong hewan/rumah potong unggas,usaha pengolahan produk peternakan dan kelembagaan usaha taniternak; bimbingan pengolahan hasil peternakan, pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan bahan asal hewan, kelembagaan usaha tani ternak dan kerjasama kemitraan usaha peternakan sesuai petunjuk teknis; bimbingan teknis usaha agribisnis peternakan, pemasaran hasil, promosi komoditas peternakan, penyebarluasan informasi pasar; bimbingan panen, pasca panen dan pengolahan hasil panen ternak; pengawasan penyaluran danpemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program; serta pengawasan kerjasama/kemitraan antar lembaga kerjasama/kemitraan peternakan.
- Menyusun konsep inovasi pada Bidang Peternakan dan kesehatan hewan.
- Melaksanakan pengelolaan resiko operasional atas kegiatan yang dilaksanakan.
- Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Peternakan dankesehatan Hewan.
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Peternakan dankesehatan Hewan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

- Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Peternakan dankesehatan Hewan.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

f. Kepala Bidang Prasarana Pertanian, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Merencanakan program dan kegiatan bidang prasarana pertanian sesuai dengan dokumen perencanaan.
- Menyusun rancangan kebijakan bidang prasarana pertanian.
- Merumuskan kebijakan teknis di bidang prasarana pertanian.
- Menyelenggarakan kegiatan pengembangan prasarana pertanian, meliputi : koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya; pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertanian; pengendalian dan pemanfaatan prasarana pascapanen tanaman pangan; pengendalian dan pemanfaatan prasarana pascapanen perkebunan; pengendalian dan pemanfaatan prasarana pascapanen hortikultura; pengendalian dan pemanfaatan prasarana pascapanen peternakan; peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan; pengendalian dan pemanfaatan prasarana pengolahan hasil hortikultura; pengendalian dan pemanfaatan prasarana pengolahan hasil tanaman pangan; pengendalian dan pemanfaatan prasarana pengolahan hasil perkebunan; penetapan kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan secara numerik dan spasial di kabupaten/kota; pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B di kabupaten/kota; penyusunan peta kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di kabupaten/kota; penyusunan action plan pengembangan prasarana, sarana, kawasan pertanian.
- Menyelenggarakan kegiatan pembangunan prasarana pertanian, meliputi : pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan dam parit; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya; rehabilitasi dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani; pembangunan dan rehabilitasi prasarana UPTD pembibitan/produksi ternak; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana prasarana laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; pembangunan dan rehabilitasi prasarana uptd balai inseminasi buatan; pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan dan operasionalisasi puskeswan; pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan dan operasionalisasi rumah potong hewan.

- Mengoordinasikan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, meliputi : peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa; pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa; penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian; pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota; penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota; pembentukan kelembagaan ekonomi petani; diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian.
- Menyusun konsep inovasi pada bidang prasarana pertanian.
- Melaksanakan pengelolaan resiko operasional atas kegiatan yang dilaksanakan.
- Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada bidang prasarana pertanian.
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada bidang prasarana pertanian.
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada prasarana pertanian.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

g. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Merencanakan program dan kegiatan bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai dengan dokumen perencanaan.
- Menyusun rancangan kebijakan bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- Merumuskan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- Menyelenggarakan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten / kota, meliputi : pengendalian

https://jdih.pemalangkab.go.id

organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; penanggulangan bencana alam bidang peternakan dan kesehatan hewan.

- Menyelenggarakan kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian, meliputi : pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi; pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian; perbanyakan benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih; perbanyakan benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk setek; pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan; pengawasan penggunaan sarana pascapanen perkebunan; pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura; perbanyakan benih bersertifikat perkebunan berbentuk batang; perbanyakan benih bersertifikat hortikultura berbentuk batang; perbanyakan benih bersertifikat perkebunan berbentuk mata tumbuh; perbanyakan benih bersertifikat perkebunan berbentuk biji; pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil perkebunan; perbanyakan benih bersertifikat perkebunan berbentuk setek; pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan; perbanyakan benih bersertifikat hortikultura berbentuk umbi; pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura; perbanyakan benih bersertifikat perkebunan berbentuk anakan.
- Menyusun konsep inovasi pada bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- Melaksanakan pengelolaan resiko operasional atas kegiatan yang dilaksanakan.
- Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

h. Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Merencanakan program dan kegiatan bidang pengelolaan perikanan tangkap sesuai dengan dokumen perencanaan.
- Menyusun rancangan kebijakan bidang pengelolaan perikanan tangkap.
- Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan perikanan tangkap.
- Menyelenggarakan program dan kegiatan pada bidang pengelolaan perikanan tangkap.
- Menyelenggarakan fasilitasi produksi dan pengawasan penangkapan yang meliputi inventarisasi nelayan dan kapal penangkap ikan sampai dengan 5 GT, pengelolaan perikanan tangkap di perairan umum daratan, identifikasi usaha peningkatan penangkapan ikan secara analisis, pengendalian dan pengawasan penangkapan ikan, koordinasi dan estimasi stock ikan sesuai dengan hasil pengolahan data penangkapan ikan, dukungan rekayasa dan menerapkan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan, fasilitasi program; asuransi nelayan, rekomendasi BBM bersubsidi dan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (SeHAT) serta pemberdayaan nelayan melalui bimbingan teknis, badan hukum dan sertifikasi kecakapan nelayan.
- Menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana penangkapan yang meliputi identifikasi pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan secara analisis, pengembangan pelabuhan perikanan beserta Tempat Pelelangan Ikan (TPI), identifikasi penggunaan alat penangkapan ikan sesuai dengan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan, serta promosi dan investasi di bidang perikanan tangkap termasuk didalamnya pengembangan kawasan perikanan tangkap berupa kampung nelayan.
- Menyelenggarakan fasilitasi bimbingan usaha dan pemasaran perikanan tangkap yang meliputi inventarisasi pengembangan pelaku usaha perikanan, pembinaan dan bimbingan penguatan kelembagaan masyarakat pesisir (kelompok wanita pesisir, kelompok taruna pesisir, dan kelompok pengolah hasil perikanan),

https://jdih.pemalangkab.go.id

penyuluhan dan pembinaan kelompok pengolah dan pemasar, serta promosi komoditas hasil perikanan.

- Melaksanakan pengelolaan resiko operasional atas kegiatan yang dilaksanakan.
- Menyusun konsep inovasi pada bidang pengelolaan perikanan tangkap.
- Mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyuluhan pada bidang pengelolaan perikanan tangkap.
- Mengoordinasikan pelaksanaan tugas lainnya pada bidang pengelolaan perikanan tangkap.
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada bidang pengelolaan perikanan tangkap.
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada bidang pengelolaan perikanan tangkap.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

i. Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Merencanakan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya sesuai dengan dokumen perencanaan.
- Menyusun rancangan kebijakan Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya.
- Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan perikanan budidaya.
- Menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya.
- Menyelenggarakan fasilitasi produksi, pembenihan dan pengendalian yang meliputi pengolahan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan; pengamatan, inventarisasi, pengendalian hama dan penyakit ikan; serta bimbingan teknis penanggulangan hama dan penyakit ikan serta penerapan standar teknis dan sertifikasi budidaya (Badan hukum dan CBIB).
- Menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana budidaya yang meliputi identifikasi pengembangan sarana dan prasarana budidaya secara analisis; bimbingan teknis pengembangan lahan dan rehabilitasi lahan di kawasan pembudidayaan ikan, pemanfaatan saluran irigasi dan pengelolaan sumber air serta pengendalian lahan dan tata guna lahan perikanan serta

https://jdih.pemalangkab.go.id

pemantauan dan pengawasan sarana produksi perikanan dan Tempat Pelelangan Hasil Tambak (TPHT).

- Menyelenggarakan fasilitasi pembinaan teknologi dan pengolahan mutu hasil budidaya perikanan yang meliputi pengolahan dan teknologi mutu hasil perikanan; bimbingan, dan pemantauan hyginitas produk dan sanitasi lingkungan usaha perikanan; pengujian mutu produk, teknologi hasil, standarisasi dan sertifikasi hasil perikanan; serta verifikasi terhadap proses produksi dan penggunaan teknologi perikanan di tingkat usaha pengolahan dan mutu hasil;
- Menyelenggarakan fasilitasi bimbingan usaha dan pemasaran perikanan budidaya yang meliputi inventarisasi pengembangan pelaku usaha perikanan, pembinaan dan bimbingan penguatan kelembagaan masyarakat, penyuluhan dan pembinaan kelompok pengolah dan pemasar, serta promosi komoditas hasil perikanan;
- Melaksanakan pengelolaan resiko operasional atas kegiatan yang dilaksanakan.
- Menyusun konsep inovasi pada Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya.
- Mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyuluhan pada Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya.
- Mengoordinasikan pelaksanaan tugas lainnya pada Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya.
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya.
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN PEMALANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor ..... Tahun 2025

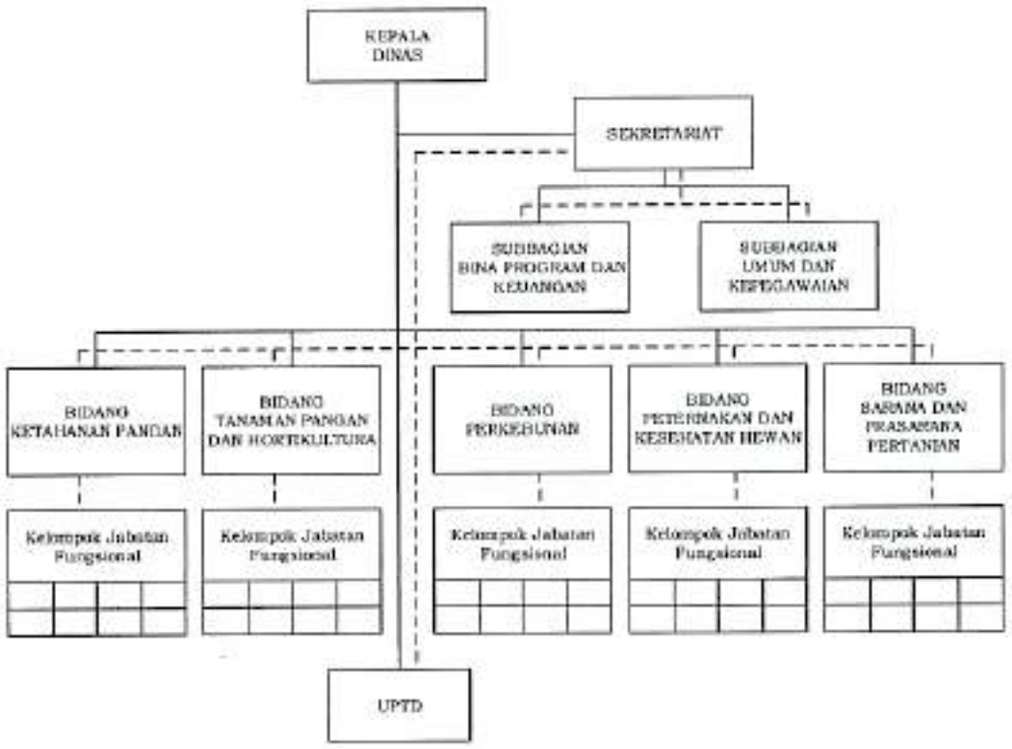

Keterangan:

_____ : Garis hirarki

- - - - - - - - - - - - - - - : Garis koordinasi

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.1.2 Sumber Daya Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

2.1.2.1 Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Pemalang pada tahun 2025 sebanyak 258 orang, yang terdiri atas 167 orang PNS, 41 orang PPPK dan 101 Non ASN. Dari jumlah tersebut, terdapat 60 orang tenaga penyuluh pertanian dan perikanan yang rencananya akan ditarik ke pemerintah pusat pada 1 November 2025. Jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Jumlah pegawai berdasarkan golongan pada tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan IV	13	4	17
2	Golongan III	38	37	75
3	Golongan II	21	13	34
4	Golongan I	-	-	-
5	P3K	28	13	41
	Jumlah			167

Tabel 2.2. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2025

No	Pendidikan	PNS		P3K		NON PNS		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	S2	12	8	-	-	-	1	21
2	S1	14	35	9	7	20	29	114
3	D3	17	10	5	1	1	2	36
4	D2	1	-	1	-	-	-	2
5	SLTA	14	3	13	5	41	7	83
6	SLTP	2	-	-	-	-	-	2
7	SD	-	-	-	-	-	-	0
	Jumlah	60	56	28	13	62	39	258

Tabel 2.3. Jumlah pegawai berdasarkan Diklat Struktural

No	Diklat Struktural	Tahun	L	P	Jumlah
1	Diklat Pim II	2012	-	-	-
		2024	-	1	1
2	Diklat Pim III	2018	1	-	1
		2019	1	-	1
		2023	-	1	1
		2024	1	-	1

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Diklat Struktural	Tahun	L	P	Jumlah
		2025	1	-	1
3	Diklat Pim IV	2005	-	1	1
		2006	-	1	1
		2008	1	-	1
		2009	-	2	2
		2011	1	-	1
		2012	1	-	1
		2013	2	-	2
		2016	1	-	1

2.1.2.2 Kondisi Umum Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sampai dengan tahun 2025, dapat dilihat pada berikut:

Tabel 2.4. Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2025

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	Tanah				
1.1	Tanah Kantor Dinas	M^2			
1.2	Tanah Kantor KJF	M^2			
1.3	Tanah Kantor BPP				
	- Pemalang	M^2	40.300	-	40.300
	- Taman	M^2	33.265	-	33.265
	- Petarukan	M^2	43.218	-	43.218
	- Ampelgading	M^2	4.500	-	4.500
	- Ulujami	M^2	1.800	-	1.800
	- Moga	M^2	15.315	-	15.315
	- Belik	M^2	12.400	-	12.400
	- Bodeh	M^2	30.460	-	30.460
	- Bantarbolang	M^2	4.500	-	4.500
	- Randudongkal	M^2	20.128	-	20.128
	- Comal	M^2	1.800	-	1.800

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
	- Pulosari	M2	7.060	-	7.060
	- Watukumpul	M2	12.400	-	12.400
	- Warungpring	M2	15.315	-	15.315
2	Gedung				
2.1	Gedung Kantor Dinas	M2	960	-	960
2.2	Gedung Kantor BPP			-	
	- Pemalang	M2	149	-	149
	- Taman	M2	63	-	63
	- Petarukan	M2	360	-	360
	- Ampelgading	M2	89	-	89
	- Ulujami	M2	168	-	168
	- Moga	M2	126	-	126
	- Belik	M2	208	-	208
	- Bodeh	M2	120	-	120
	- Bantarbolang	M2	140	-	140
	- Randudongkal	M2	232	-	232
	- Comal	M2	215	-	215
	- Pulosari	M2	90	-	90
	- Watukumpul	M2	35	-	35
	- Warungpring	M2	232	-	232
2.3	Gedung UBIAT	M2	8.506	-	8.506
2.4	Gedung UPI	M2	166	-	166
2.5	TPI Tanjungsari	M2	1.020	-	1.020
2.6	TPI Nyamplungsari	M2	5.535	-	5.535
3	Tanah				
3.1	Ds. Limbangan (Tambak Ikan dan Pos Penyuluh)	M2	22.000	-	22.000

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
3.2	Ds. Asemdoyong (Tambak Ikan)	M^2	22.500	-	22.500
3.3	Ds. Limbangan (Tambak Ikan)	M^2	30.390	-	30.390
	Kel. Sugihwaras (Docking Kapal)	M^2	12.500	-	12.500
	Kel. Sugihwaras (Penjemuran Ikan)	M^2	9.600	-	9.600
	Ds. Banjaranyar (Kolam Ikan)	M^2	4.472	-	4.472
4	Properti				
4.1	Kendaraan Dinas				
	- Minibus	Unit	17	-	10
	- Pick Up	Unit	8	-	1
	- Sepeda Motor	Unit	147	10	120
4.2	Alat Kantor				
	- PC	Unit	35	3	38
	- Laptop	Unit	147	8	155
	- Printer	Unit	57	40	97
	- Computer Compatible	Unit	2	-	2
	- Camera	Unit	3	-	3
	- LCD Projector	Unit	5	3	8
	- Sound System	Unit	8	-	8
	- Alat Kantor Lainnya	Unit	15	-	15
	- AC Split	Unit	40	2	42
	- Microphone	Unit	7	-	7
	- Mesin Potong	Unit	1	-	1
	- Tripod	Unit	3	-	3
	- TV Monitor	Unit	2	-	2

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

2.1.3.1 Lumbung Pangan

Kabupaten Pemalang memiliki potensi pertanian yang besar dan strategis sebagai daerah penyangga pangan di Jawa Tengah. Untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani, pemerintah daerah mendorong pengembangan lumbung pangan berbasis komunitas. Lumbung pangan ini berperan sebagai pusat cadangan, distribusi, dan pengelolaan hasil pertanian secara berkelanjutan, guna memperkuat ketahanan pangan lokal dan menghadapi risiko krisis pangan di masa depan. Sebaran fisik Lumbung Pangan di Kabupaten Pemalang dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5

Data Lumbung Pangan Di Kabupaten Pemalang

No.	DESA	KECAMATAN	NAMA LUMBUNG
1	Mengori	Pemalang	Lestari
2	Tambakrejo	Pemalang	Maju makmur
3	Kramat	Pemalang	
4	Asemdoyong	Taman	Mekar Sejahtera
5	Kedungbanjar	Taman	Tani Makmur
6	Kedungbanjar	Taman	Mahdani
7	Pedurungan	Taman	Tani Maju
8	Gondang	Taman	Mekar Makmur
9	Kabunan	Taman	Mekar Tani
10	Jrakah	Taman	Mekar Jaya
11	Penggarit	Taman	Mekar Sari
12	Pener	Taman	Mekar Santoso
13	Widodaren	Petarukan	Maju Makmur
14	Pesucen	Petarukan	Sri Tani
15	Kalirandu	Petarukan	Sejahtera Abadi
16	Iser	Petarukan	Usaha Makmur
17	Temuireng	Petarukan	Sido Makmur
18	Serang	Petarukan	Harapan Maju
19	Loning	Petarukan	Rukun Tani
20	Loning	Petarukan	Pantun Makmur
21	Tegalmlati	Petarukan	Melati Makmur
22	Nyampungsari	Petarukan	Sejahtera Makmur
23	Panjunan	Petarukan	Sejahtera Tani
24	Kendal Rejo	Petarukan	Maju Makmur
25	Klareyan	Petarukan	Mangu Rejo
26	Gedeg	Comal	Pantu Lestari
27	Sarwodadi	Comal	Sumber Makmur
28	Susukan	Comal	Sami Berkah
29	Klegen	Comal	Makmur
30	Kandang	Comal	Margo Mulyo
31	Gintung	Comal	
32	Wonogiri	Ampelgading	Langgeng
33	Blumbing	Ampelgading	Warga Mukti
34	Ampelgading	Ampelgading	Guyub Rukun

https://jdih.pemalangkab.go.id

No.	DESA	KECAMATAN	NAMA LUMBUNG
35	Cibiyuk	Ampelgading	Subur Makmur
36	Losari	Ampelgading	Guyub Tani
37	Kebagusan	Ampelgading	Guyub Makmur
38	Karangtalok	Ampelgading	
39	Bumirejo	Ulujami	Tani Makmur
40	Pamutih	Ulujami	Berkah Jaya
41	Kalipran	Ulujami	Karya Mukti
42	Mojo	Ulujami	Talang Sari

2.1.3.2 Cadangan Pangan

Cadangan pangan di Kabupaten Pemalang disiapkan sebagai upaya menjaga ketahanan pangan daerah, terutama dalam menghadapi kondisi darurat seperti bencana alam, gagal panen, atau lonjakan harga. Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dan Dinas Ketahanan Pangan bekerja sama dalam penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan, khususnya beras, yang disimpan di gudang-gudang pemerintah dan lumbung pangan masyarakat. Selain itu, produksi padi yang cukup tinggi turut mendukung ketersediaan stok pangan daerah. Cadangan ini berperan penting untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat, terutama di wilayah rawan pangan dan saat kondisi krisis. Berikut data penyaluran cadangan pangan dari Tahun 2021-2024 di Kabupaten Pemalang.

Tabel 2.6

Data Cadangan Pangan Tahun 2021-2024 Di Kabupaten Pemalang

Tahun	Persediaan (Ton)	Tersalurkan (Ton)	Lokasi Penerima Cadangan Pangan
2021	5	5	1. Desa Tasikrejo Kec. Ulujami
			2. Desa Samong Kec. Ulujami
			3. Desa Tasikrejo Kec. Ulujami
			4. Desa Blendung Kec. Ulujami
			5. Desa Ketapang Kec. Ulujami
			6. Desa Saradan Kec. Pemalang
			7. Desa Warungpring Kec. Warungpring
			8. Desa Kalisaleh Kec. Belik
2022	4	4	1. Desa Karangasem Kec. Petarukan
			2. Desa Gembyang Kec. Bantarbolang
			3. Desa Mojo Kec. Ulujami
			3. Desa Kecepit Kec. Randudongkal
			4. Desa Tambi Kec. Watukumpul
			5. Desa Majakerta Kec. Watukumpul
2023	4	4	1. Desa Pegongsoran Kec. Pemalang
2024	15,721	1,375	1. Desa Pesantren Kec. Ulujami
			2. Desa Mojo Kec. Ulujami
			3. Desa Blendung Kec. Ulujami
			4. Desa Warungpring Kec. Warungpring

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tahun	Persediaan (Ton)	Tersalurkan (Ton)	Lokasi Penerima Cadangan Pangan
			5. Desa Randudongkal Kec. Randudongkal
			6. Desa Clekatakan Kec. Pulosari
			7. Desa Suru Kec. Bantarbolang
			8. Desa Gombong Kec. Belik
			9. Kelurahan Beji Kec. Taman

2.1.3.3 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

LP2B adalah lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dipertahankan secara konsisten agar dapat digunakan untuk produksi pangan secara berkelanjutan, serta tidak dialihfungsikan untuk kegiatan non-pertanian (seperti perumahan, industri, dan sebagainya). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), luas lahan sawah irigasi yang ditetapkan sebagai LP2B mencapai 30.299 hektare, dengan tambahan 4.000 hektare sebagai lahan cadangan pangan . Penetapan ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan dan mencegah alih fungsi lahan pertanian yang dapat mengancam ketahanan pangan daerah. Berikut tabel Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pemalang.

Tabel 2.7

Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pemalang

KECAMATAN	LUAS LP2B
Ampelgading	2,267.17
Bantarbolang	2,959.10
Belik	2,479.47
Bodeh	2,435.65
Comal	1,126.26
Moga	1,193.18
Pemalang	3,200.39
Petarukan	4,703.53
Pulosari	201.86
Randudongkal	2,782.63
Taman	2,963.22
Ulujami	2,212.59
Warungpring	887.29
Watukumpul	887.14
Grand Total	**30,299.48**

2.1.3.4 Produksi Unggulan Pertanian

Kabupaten Pemalang memiliki beragam komoditas unggulan di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan yang berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian daerah. Di sektor tanaman pangan, padi dan jagung menjadi komoditas utama yang tersebar luas di

https://jdih.pemalangkab.go.id

hampir seluruh kecamatan, khususnya di wilayah dataran rendah. Untuk komoditas hortikultura, Pemalang dikenal sebagai penghasil buah-buahan berkualitas seperti nanas, mangga, dan durian. Nanas dari wilayah Belik dan sekitarnya memiliki rasa manis khas dan menjadi ikon daerah. Sementara mangga dan durian tumbuh subur di wilayah selatan dan tengah, menjadi potensi agrowisata dan ekspor lokal. Sektor perkebunan juga menunjukkan potensi besar, terutama dalam produksi kopi dan tembakau. Kopi robusta dari wilayah Moga dan Pulosari mulai dikenal luas karena cita rasanya yang kuat, sedangkan tembakau ditanam secara musiman dan menjadi sumber pendapatan tambahan petani. Di bidang peternakan, Kabupaten Pemalang menghasilkan produk hewani seperti daging sapi, daging kambing, dan daging unggas. Populasi ternak tersebar merata di berbagai wilayah, dengan kontribusi signifikan terhadap pasokan protein hewani bagi masyarakat serta potensi pengembangan agribisnis berbasis peternakan. Produksi unggulan yang beragam ini mencerminkan kekayaan sumber daya alam dan potensi ekonomi lokal yang terus dikembangkan untuk mendorong kesejahteraan petani dan peternak di Kabupaten Pemalang.. Tabel berikut menampilkan data produksi unggulan pertanian di Kabupaten Pemalang sampai Tahun 2024.

Tabel 2.8

Data Produksi Unggulan Pertanian di Kabupaten Pemalang

Komoditas	Satuan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
Padi	Ton	591.584	590.412	561.995	530.673
Jagung	Ton	62.143	77.485	60.033	54.397
Durian	Ton	1.116	984	2.538	1.808
Mangga	Ton	20.536	19.517	20.242	19.175
Nanas	Ton	76.648	74.769	77.339	187.010
Kopi	Ton	548,01	479,95	444,27	508
Tembakau	Ton	398,64	413,27	431,90	455
Daging Sapi	Kg	915.840	926.640	931.140	962.460
Daging Kambing	Kg	905.198	905.331	905.426	567.872
Daging Unggas	Kg	2.166.118	2.197.141	2.197.043	2.800.100

2.1.3.5 Prasarana Pertanian

Prasarana pertanian di Kabupaten Pemalang, khususnya jalan usaha tani dan jaringan irigasi, menjadi tulang punggung kelancaran aktivitas produksi dan distribusi hasil pertanian. Jalan usaha tani, yang menghubungkan lahan petani dengan wilayah pemasaran dan sarana produksi, sebagian sudah beraspal atau diperkeras, namun masih terdapat lokasi-lokasi yang perlu perbaikan guna memfasilitasi akses sepanjang tahun, khususnya saat musim hujan. Sementara itu, jaringan irigasi di Kabupaten

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pemalang yang terdiri dari irigasi teknis, setengah teknis, dan tersier berperan penting dalam menyalurkan air secara merata ke lahan pertanian, meningkatkan produktivitas padi dan tanaman pangan lainnya. Tabel berikut menampilkan data kondisi prasarana pertanian (jaringan irigasi dan jalan usaha tani) sampai Tahun 2024 yang ada di Kabupaten Pemalang.

Tabel 2.9

Data Kondisi Prasarana Pertanian Kabupaten Pemalang

No	Kecamatan	Panjang Jarigan Irigasi Tersier (m)	Kondisi Saluran Irigasi Tersier				Persentase Kerusakan (%)	Persentase dalam kondisi baik (%)
			Masih Tanah (m)	Baik (m)	Rusak Sedang (m)	Rusak Berat (m)		
1	Ampelgading	91.789	9.136	19.935	16.960	45.761	78,28	21,72
2	Bantarbolang	70.800	8.720	9.825	11.450	40.805	86,12	13,88
3	Bodeh	20.430	250	7.142	500	12.538	65,04	34,96
4	Comal	68.527	5.760	11.514	10.451	40.802	83,20	16,80
5	Moga	85.822	7.628	15.477	9.962	52.755	81,97	18,03
6	Pemalang	178.406	33.744	42.417	38.795	63.450	76,22	23,78
7	Petarukan	201.739	34.460	49.592	44.258	73.429	75,42	24,58
8	Pulosari	4.900	268	2.232	350	2.050	54,45	45,55
9	Randudongkal	142.000	10.000	25.000	29.000	78.000	82,39	17,61
10	Taman	89.300	12.850	16.700	19.900	39.850	81,30	18,70
11	Ulujami	44.277	14.688	13.514	6.150	9.925	69,48	30,52
12	Warungpring	66.000	15.536	12.464	14.000	24.000	81,12	18,88
13	Watukumpul	81.913	4.788	8.593	3.482	65.050	89,51	10,49
14	Belik	127.283	20.695	27.233	24.107	55.248	78,60	21,40
JUMLAH		**1.273.186**	**178.523**	**261.638**	**229.365**	**603.663**	**79,45**	**20,55**

No	Kecamatan	Panjang Jalan UsahaTani (m)	Kondisi Jalan Usaha Tani				Persentase Kerusakan (%)	Persentase dalam kondisi baik (%)
			Masih Tanah (m)	Baik (m)	Rusak Sedang (m)	Rusak Berat (m)		
1	Moga	20.880	3.811	4.099	7.310	5.660	80,37	19,63
2	Warungpring	16.900	4.350	2.420	3.230	6.900	85,68	14,32
3	Pulosari	14.600	3.240	3.550	3.910	3.900	75,68	24,32
4	Belik	24.850	4.301	7.449	4.625	8.475	70,02	29,98
5	Watukumpul	22.543	2.636	5.550	4.987	9.370	75,38	24,62
6	Bodeh	22.280	9.170	5.850	2.250	3.610	67,46	26,26
7	Bantarbolang	23.870	6.460	3.800	6.310	7.300	84,08	15,92
8	Randudongkal	26.935	7.725	6.575	4.215	8.420	75,59	24,41
9	Pemalang	29.750	9.711	9.669	4.870	5.500	67,50	32,50
10	Taman	26.650	9.299	6.951	4.350	6.050	73,92	26,08
11	Petarukan	28.260	8.090	7.230	4.490	8.450	74,42	25,58
12	Comal	21.750	7.350	2.760	3.490	8.150	87,31	12,69
13	Ampelgading	23.900	10.350	6.350	5.000	2.200	73,43	26,57
14	Ulujami	24.987	9.279	5.790	3.524	6.394	76,83	23,17
JUMLAH		**328.155**	**95.772**	**78.043**	**62.561**	**90.379**	**75,79**	**23,78**

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.1.3.6 Kelompok Tani

Kelompok Tani (Poktan) di Kabupaten Pemalang merupakan pilar utama dalam pengembangan sektor pertanian daerah. Mereka berperan sebagai wadah organisasi petani yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kesejahteraan petani melalui kerja sama, pelatihan, serta akses terhadap bantuan pemerintah. Tabel berikut menampilkan daftar kelompok tani yang berada di bawah binaan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

Tabel 2.10

Jumlah Kelembagaan Kelompok Tani yang di Bina

Jumlah Kelompok Tani Yang Terbina		2022	2023	2024	Keterangan
1	Moga	47	48	48	Klp
2	Pulosari	107	122	124	Klp
3	Belik	136	137	142	Klp
4	Watukumpul	89	90	91	Klp
5	Bodeh	72	72	72	Klp
6	Bantarbolang	75	75	75	Klp
7	Randudongkal	71	105	105	Klp
8	Pemalang	84	84	84	Klp
9	Taman	75	75	75	Klp
10	Petarukan	85	85	85	Klp
11	Ampelgading	58	58	58	Klp
12	Comal	49	49	49	Klp
13	Ulujami	84	84	84	Klp
14	Warungpring	39	39	39	Klp

2.1.3.7 Alat dan Mesin Pertanian

Alat dan Mesin Pertanian (disingkat: Alsintan) merupakan berbagai jenis peralatan mekanis yang digunakan dalam kegiatan usaha tani untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses produksi pertanian. Penggunaan alsintan menjadi bagian penting dari modernisasi pertanian, karena mampu meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya produksi, dan menghemat tenaga kerja. Sebaran alat dan mesin pertanian di Kabupaten Pemalang dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11

Sebaran Alat dan Mesin Pertanian

Jenis Alsintan	Jumlah
Cultivator	19 unit
Hand Traktor Roda 2	2 unit
Traktor Roda 2	14 unit

https://jdih.pemalangkab.go.id

Jenis Alsintan	Jumlah
Traktor Impala	40 unit
Mesin Panen Jagung	2 unit
Combine	28 unit
Power Thresher	52 unit
Corn Sheller	25 unit
Vertikal Dryer	8 unit
APPO	4 unit
Pompa Air 6 Inch	2 unit
Pompa Air 3 Inch	40 unit
Rice Miling Unit	6 unit

2.1.3.8 Penyaluran Pupuk

Penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Pemalang dilaksanakan berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disusun oleh kelompok tani dan diverifikasi oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan. Untuk memastikan distribusi yang tepat sasaran, pemerintah menerapkan Program Kartu Tani yang mengatur penyaluran pupuk berdasarkan enam asas tepat: tepat jumlah, jenis, mutu, tempat, harga, dan waktu. Berikut data penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2024.

Tabel 2.12

Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Tanam	Jumlah	Alokasi	Jumlah	Sisa	Persentase Tersalurkan
		Ha	Petani	Urea	Salur	Salur	
1	Moga	3.821,92	3.803	795,000	611,448	183,552	76,91
2	Warungpring	3.105,49	2.833	760,000	479,778	280,222	63,13
3	Petarukan	11.499,02	7.712	2.842,000	2.338,038	503,962	82,27
4	Ulujami	2.671,45	2.568	664,000	498,598	165,402	75,09
5	Ampelgading	7.611,91	4.948	1.884,000	1.613,243	270,757	85,63
6	Comal	2.902,62	2.857	722,000	643,289	78,711	89,10
7	Taman	9.245,55	5.654	2.288,000	1.987,478	300,522	86,87
8	Pulosari	6.488,74	6.520	668,000	265,529	402,471	39,75
9	Randudongkal	9.236,07	6.703	2.261,000	2.004,886	256,114	88,67
10	Pemalang	10.918,13	5.494	2.680,170	2.574,914	105,256	96,07
11	Belik	10.063,36	9.486	1.774,000	1.380,243	393,757	77,80
12	Watukumpul	8.029,84	8.347	1.684,000	1.581,377	102,623	93,91
13	Bantarbolang	9.557,03	7.643	2.325,000	1.988,637	336,363	85,53
14	Bodeh	10.090,68	7.147	2.452,000	1.970,292	481,708	80,35
		105.241,81	**81.715**	**23.799,170**	**19.937,750**	**3.861,420**	**83,77**

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Kecamatan	Luas Tanam	Jumlah	Alokasi	Jumlah	Sisa	Persentase Tersalurkan
		Ha	PETANI	NPK	SALUR	SALUR	
1	Moga	3.821,92	3.803	633,000	438,502	194,50	69,27
2	Warungpring	3.105,49	2.833	518,000	322,751	195,25	62,31
3	Pulosari	6.488,74	6.520	1.279,000	496,753	782,25	38,84
4	Belik	10.063,36	9.486	1.677,000	912,268	764,73	54,40
5	Watukumpul	8.029,84	8.347	1.339,000	889,962	449,04	66,46
6	Bodeh	10.090,68	7.147	1.637,000	1.002,203	634,80	61,22
7	Bantarbolang	9.557,03	7.643	1.550,000	1.282,059	267,94	82,71
8	Randudongkal	9.236,07	6.703	1.455,000	1.097,778	357,22	75,45
9	Pemalang	10.918,13	5.494	1.740,820	1.350,360	390,46	77,57
10	Taman	9.245,55	5.654	1.446,000	1.146,982	299,02	79,32
11	Petarukan	11.499,02	7.712	1.792,000	1.264,026	527,97	70,54
12	Comal	2.902,62	2.857	465,000	373,047	91,95	80,23
13	Ampelgading	7.611,91	4.948	1.193,000	886,233	306,77	74,29
14	Ulujami	2.671,45	2.568	430,000	309,512	120,49	71,98
		105.241,81	**81.715**	**17.154,820**	**11.772,436**	**5.382,38**	**68,62**

2.1.3.9 Pemotongan Hewan

Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Kabupaten Pemalang merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah daerah untuk memastikan proses pemotongan hewan dilakukan secara higienis, aman, dan sesuai syariat. RPH berfungsi sebagai tempat pemotongan yang memenuhi standar kesehatan masyarakat veteriner, dengan pengawasan ketat dari petugas dan dokter hewan. Setiap hewan yang akan dipotong di RPH wajib melalui pemeriksaan ante-mortem (sebelum pemotongan) dan post-mortem (setelah pemotongan) guna memastikan daging yang dihasilkan layak konsumsi dan bebas penyakit. Proses pemotongan dilakukan oleh tenaga profesional, termasuk juru sembelih halal (Juleha), serta memperhatikan aspek kesejahteraan hewan. Keberadaan RPH ini sangat penting dalam menjaga kualitas daging yang beredar di masyarakat serta mendukung ketahanan pangan daerah. Tabel berikut menampilkan data pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan Tahun 2024.

Tabel 2.13

Data Pemotongan Hewan di RPH Kabupaten Pemalang Tahun 2024

Nama RPH	domba	kambing	Sapi	Grand Total
RPH-R Comal	0	108	405	513
RPH-R Moga	705	0	19	724
RPH-R Pemalang	0	3	336	339
RPH-R Randudongkal	2797	9	1059	3865
Grand Total	**3502**	**291**	**1819**	**5612**

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.1.3.10 Pelayanan Kesehatan Hewan

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan melalui UPTD Rumah Potong Hewan dan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) menyediakan berbagai layanan kesehatan hewan, diantaranya yaitu Konsultasi, Pemeriksaan, Pengobatan, Vaksinasi, dan kawin suntik. Masyarakat yang membutuhkan bisa langsung membawa hewan peliharaan atau ternak ke lokasi Puskeswan. Hingga saat ini ada 4 puskeswan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pemalang yaitu Puskeswan Pemalang, Randudongkal, Comal, dan Belik. Jika tidak memungkinkan untuk membawa ternaknya ke Puskeswan, para peternak juga dapat menghubungi call center puskeswan agar petugas yang datang ke lokasi kandang ternak untuk dilakukan pelayanan kesehatan hewan. Selain itu, melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan juga secara rutin melaksanakan Pengobatan massal pada kelompok ternak yang membutuhkan, Pengobatan yang diberikan berupa pemberian vitamin, obat cacing, maupun vaksinasi. Dalam pengendalian wabah PMK yang terjadi, Pemerintah telah bergerak cepat dengan cara pengetatan pemantauan lalu lintas ternak, pengujian sampel, Pengobatan, Vaksinasi, maupun edukasi kepada para peternak.

Tabel 2.14

Data Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Pemalang
Tahun 2024

No.	Jumlah Hewan yang Dilayani (ekor)						
	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Babi	Unggas	Hewan Kesayangan
1.	4.789	977	14.613	14.735	1.230	111.485	2.277

2.1.3.11 Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di Kabupaten Pemalang masih berada pada tingkat tinggi, terutama pada komoditas padi dan jagung. Hama seperti tikus sawah, penggerek batang padi, dan wereng coklat sering muncul selama musim tanam, menyebabkan kerusakan signifikan pada tanaman dan menurunkan hasil panen. Sebaran Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Kabupaten Pemalang dapat di lihat pada tabel berikut ini.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.15

Data Luas Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tahun 2024

NO	KEC	OPT																JUMLAH TOTAL	
		0101		0102		0104		0106		0107		0111		0114		0115			
		P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T
1	Pemalang	-	18	-	20	-	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174
2	Taman	-	-	-	58	-	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152
3	Petarukan	-	714	-	37	-	1.412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.163
4	Ampelgading	-	356	-	29	-	864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.249
5	Comal	-	37	-	8,5	-	9	-	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	67
6	Ulujami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bodeh	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
8	Bantarbolang	-	19	-	3	-	3	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	35
9	Randudongkal	-	50	-	-	-	32	-	18	-	25	-	-	-	22	-	13	-	160
10	Moga	-	27	-	-	-	10	-	-	-	18	-	-	-	17	-	2	-	74
11	Warungpring	-	42	-	-	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
12	Belik	-	80	-	-	-	8	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113
13	Pulosari	-	8	-	-	-	5	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	17
14	Watukumpul	-	49	-	-	-	8	-	6	-	-	-	-	-	12	-	-	-	75
JUMLAH		-	1.409	-	155,5	-	2.583	-	70	-	48	-	4	-	51	-	16	-	4.336,5

Keterangan :'

0101 Penggerek Batang Padi
0102 Wereng Coklat
0104 Tikus
0106 Hama putih
0107 Walangsangit
0111 Blas
0114 Bakteri Hawar Daun/ Kresek
0115 Tungro

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.1.3.12 Produksi Perikanan

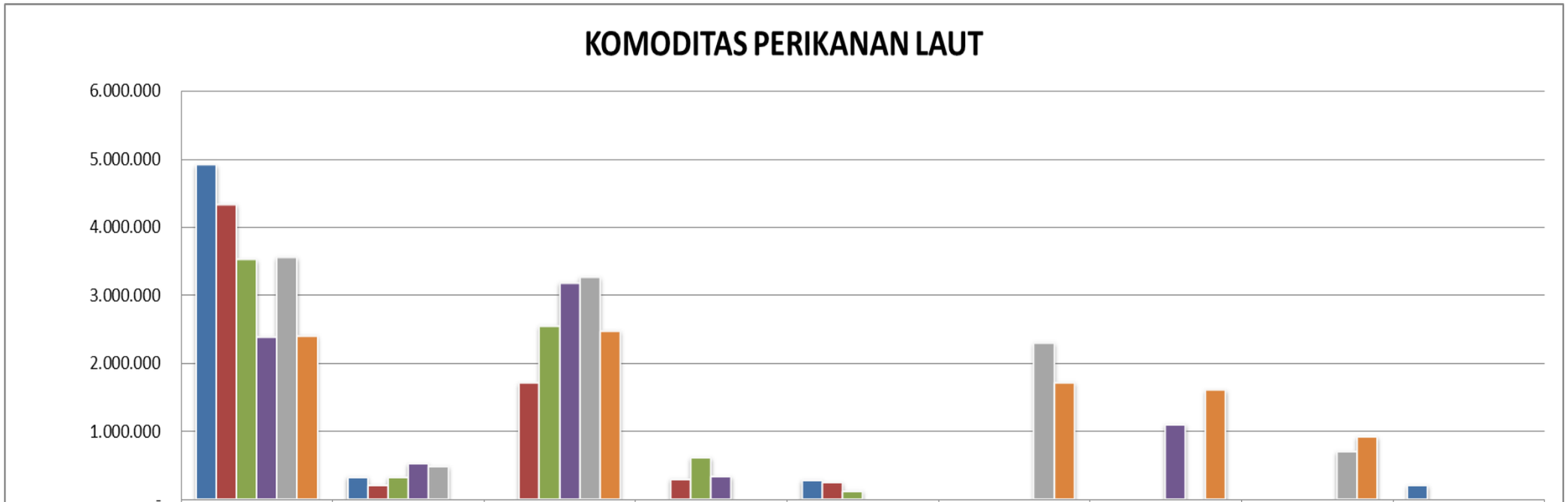

	Tembang	Cumi2	Teri	Krosok	Tenggiri	Beloso	Kuniran	Peci	Tongkol
TAHUN 2019 (kg)	4.915.207	334.351			288.347				206.636
TAHUN 2020 (kg)	4.337.902	211.040	1.713.633	305.124	250.894				
TAHUN 2021 (kg)	3.523.873	328.378	2.550.063	614.671	126.089				
TAHUN 2022 (kg)	2.390.464	529.470	3.184.736	338.499			1.104.295		
TAHUN 2023 (kg)	3.557.584	487.341	3.265.828			2.302.310		704.056	
TAHUN 2024 (kg)	2.409.765	-	2.475.002			1.720.603	1.609.842	924.670	

https://jdih.pemalangkab.go.id

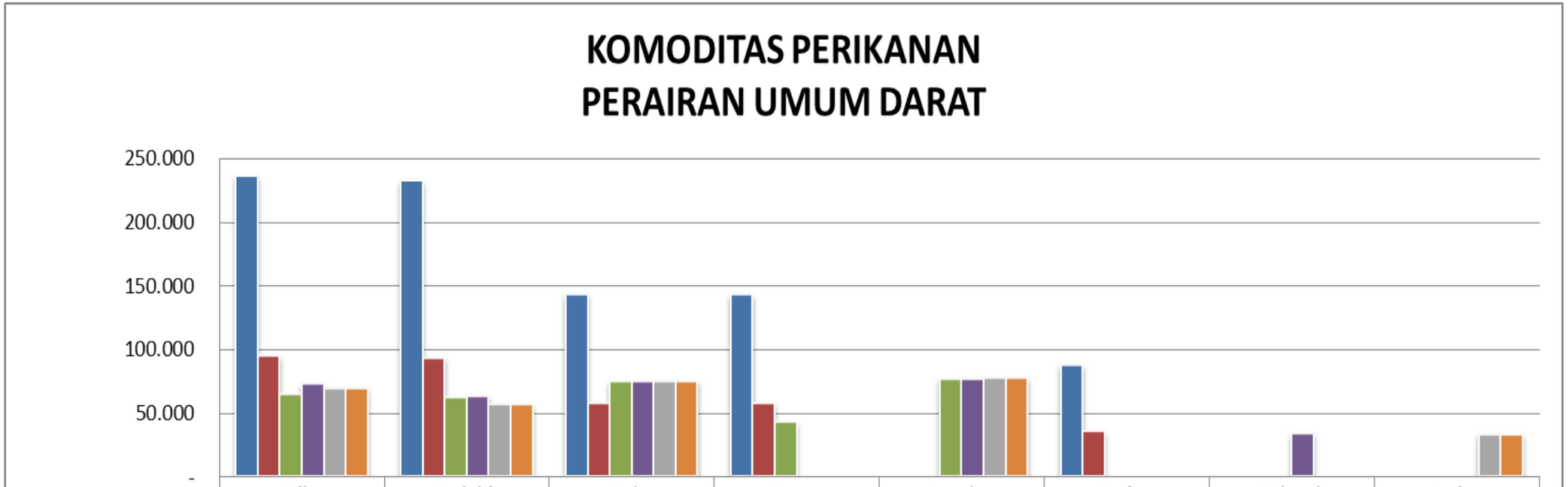

	Nila	Mujahir	Lele	Tawes	Ragalan	Keting	Belanak	Janjan
TAHUN 2019 (kg)	236.148	232.338	143.338	142.543		87.203		
TAHUN 2020 (kg)	94.459	92.935	57.335	57.017		34.881		
TAHUN 2021 (kg)	64.116	61.822	74.193	42.336	76.145			
TAHUN 2022 (kg)	72.425	62.836	74.508		76.474		33.674	
TAHUN 2023 (kg)	68.973	56.498	74.824		76.805			32.700
TAHUN 2024 (kg)	68.973	56.498	74.824		76.805			32.700

https://jdih.pemalangkab.go.id

KOMODITAS PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU (TAMBAK)

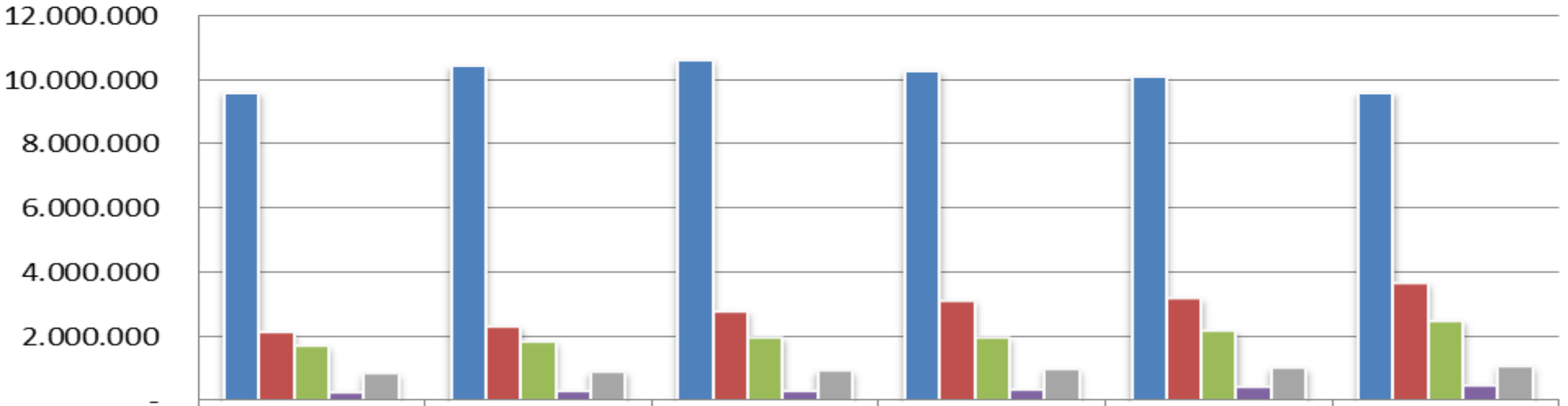

	TAHUN 2019 (kg)	TAHUN 2020 (kg)	TAHUN 2021 (kg)	TAHUN 2022 (kg)	TAHUN 2023 (kg)	TAHUN 2024 (kg)
Bandeng	9.622.232	10.448.200	10.635.400	10.282.800	10.118.566	9.612.638
Vanamei	2.115.874	2.297.500	2.770.500	3.101.235	3.180.175	3.657.200
Lele	1.668.114	1.811.304	1.960.000	1.949.285	2.150.730	2.473.340
Kepiting	249.853	271.300	264.000	304.328	399.477	459.399
Patin	807.900	877.250	909.800	949.657	990.569	1.040.097

https://jdih.pemalangkab.go.id

KOMODITAS PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR (KOLAM)

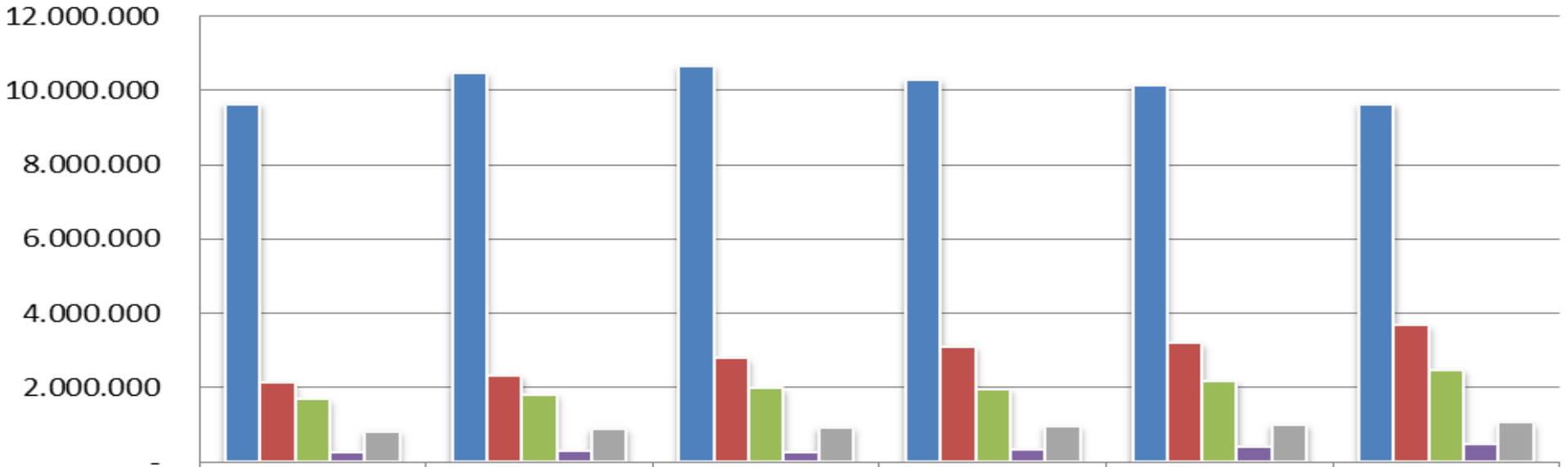

	TAHUN 2019 (kg)	TAHUN 2020 (kg)	TAHUN 2021 (kg)	TAHUN 2022 (kg)	TAHUN 2023 (kg)	TAHUN 2024 (kg)
Bandeng	9.622.232	10.448.200	10.635.400	10.282.800	10.118.566	9.612.638
Vanamei	2.115.874	2.297.500	2.770.500	3.101.235	3.180.175	3.657.200
Lele	1.668.114	1.811.304	1.960.000	1.949.285	2.150.730	2.473.340
Kepiting	249.853	271.300	264.000	304.328	399.477	459.399
Patin	807.900	877.250	909.800	949.657	990.569	1.040.097

https://jdih.pemalangkab.go.id

KOMODITAS PEMBENIHAN DAN PERBESARAN IKAN

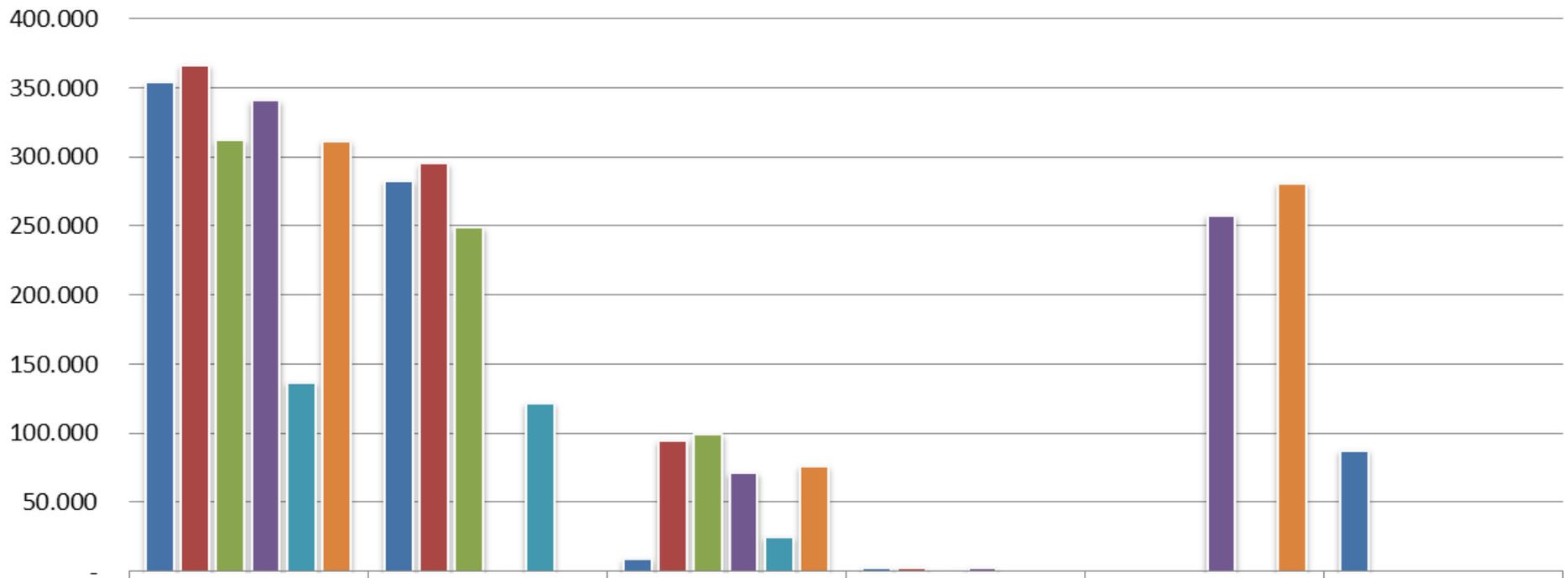

	Nila Hitam	Nila Merah	Lele	Gurame	Nila Larasati	Tawes
TAHUN 2019 (ekor)	354.000	282.900	9.200	2.900		87.800
TAHUN 2020 (ekor)	366.800	295.400	95.000	3.000		
TAHUN 2021 (ekor)	312.300	249.300	99.700	900		
TAHUN 2022 (ekor)	341.000		71.500	2.500	258.000	
TAHUN 2023 (ekor)	137.000	122.000	25.000			
TAHUN 2024 (ekor)	312.000		76.500		281.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

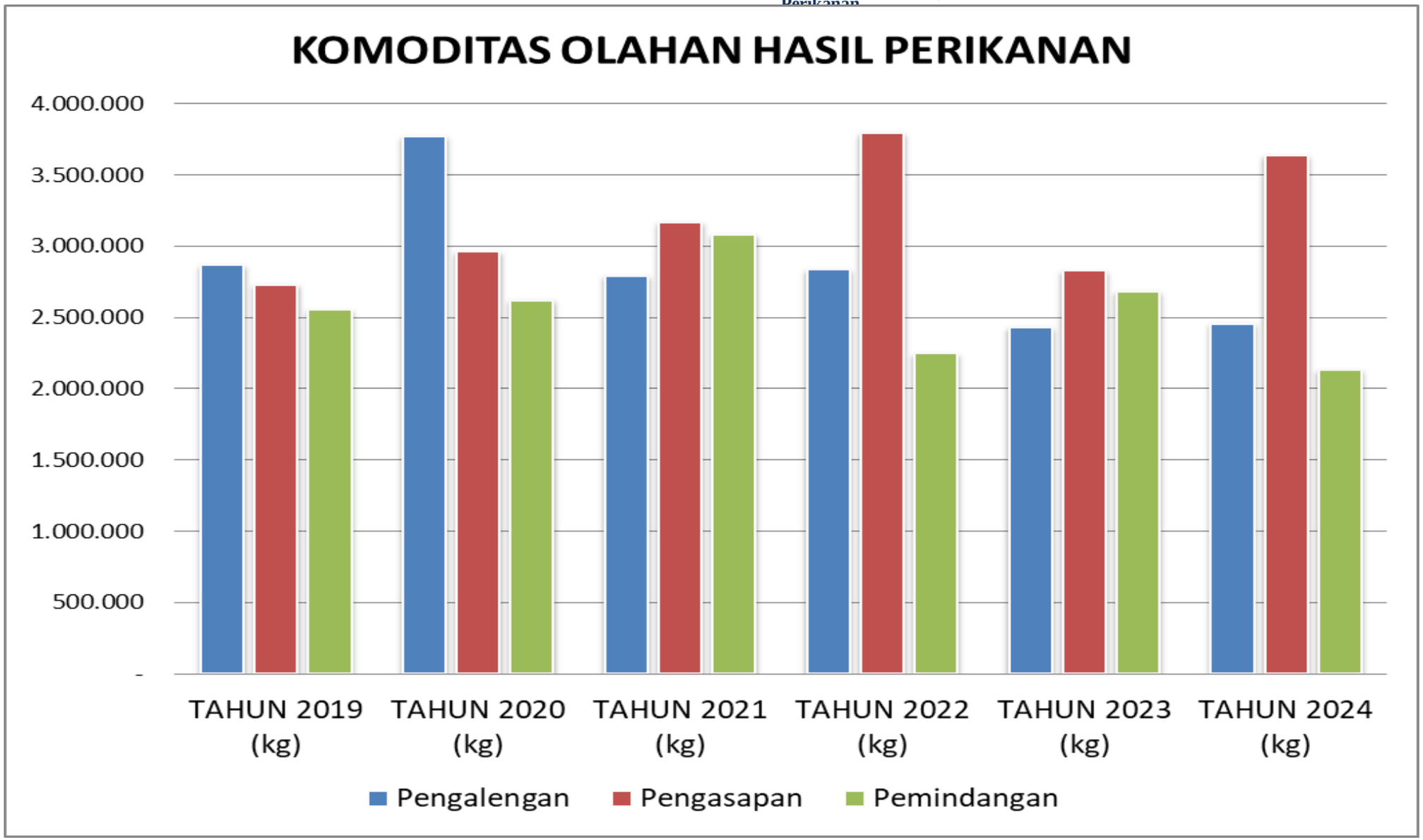

https://jdih.pemalangkab.go.id

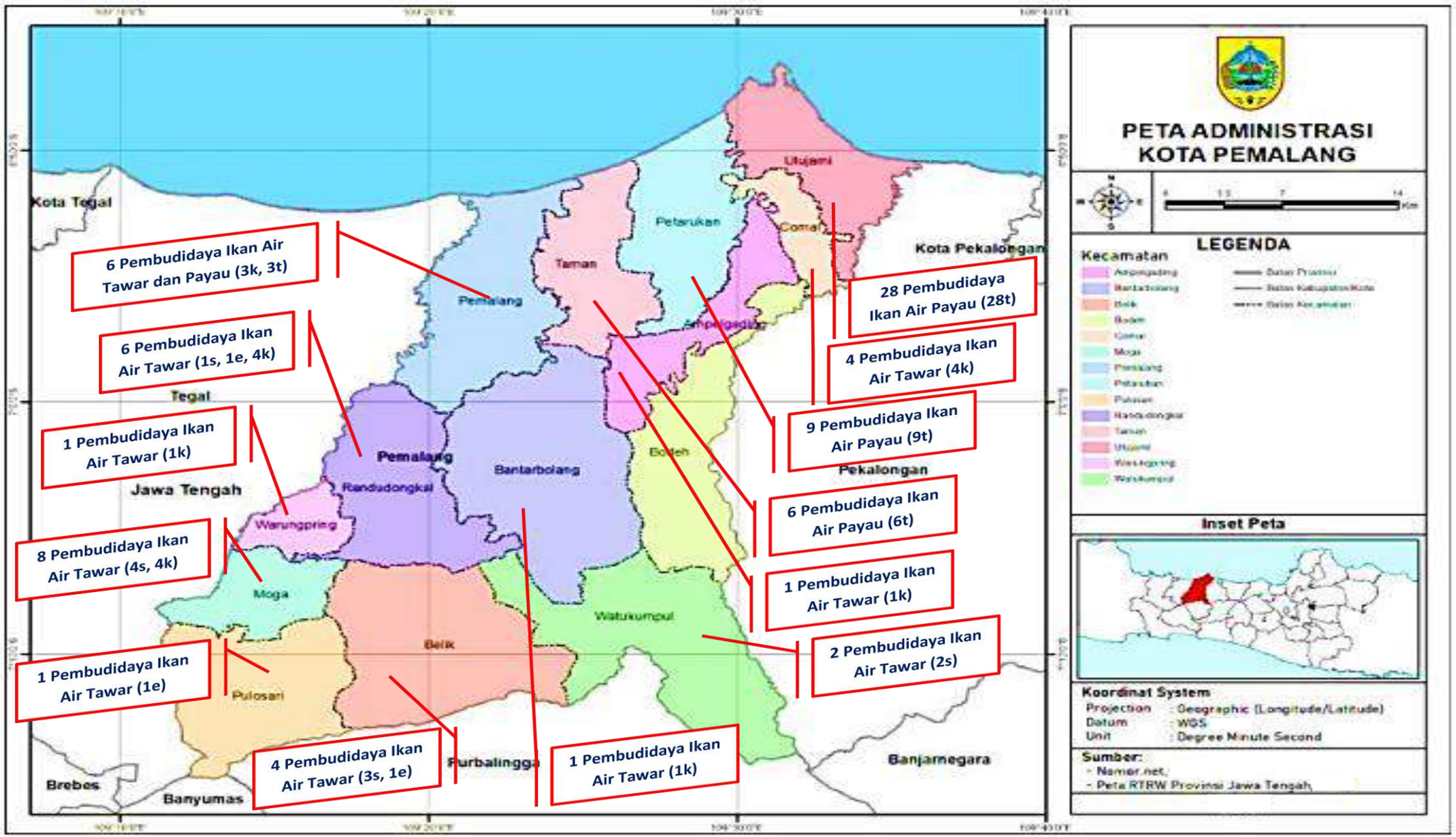

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel Maximum Sustainable Yield
Daerah Penangkapan Ikan Kapal Nelayan Kecil < 5 GT
Di Pantai Utara Jawa

Tahun	Produksi (Kg)	80% dr. Tangkapan Maksimum Lestari (Kg)	Proporsi Penangkapan Ikan Dalam MSY (%)
2005	13.212.100	85.582.840	15,44%
2006	14.471.800	85.582.840	16,91%
2007	10.058.200	85.582.840	11,75%
2008	10.058.200	85.582.840	11,75%
2009	10.791.500	85.582.840	12,61%
2010	14.064.000	85.582.840	16,43%
2011	17.107.800	85.582.840	19,99%
2012	18.126.000	85.582.840	21,18%
2013	19.299.100	85.582.840	22,55%
2014	28.161.166	85.582.840	32,91%
2015	26.882.859	85.582.840	31,41%
2016	27.092.348	85.582.840	31,66%
2017	26.511.707	85.582.840	30,98%
2018	21.890.350	85.582.840	25,58%
2019	16.973.640	85.582.840	19,83%
2020	18.096.881	85.582.840	21,15%
2021	18.396.293	85.582.840	21,50%
2022	21.803.637	85.582.840	25,48%
2023	22.366.854	85.582.840	26,13%
2024	21.009.034	85.582.840	24,55%

https://jdih.pemalangkab.go.id

Peta Ikan Kabupaten Pemalang
Komoditi Perikanan Budidaya

	Pemalang	Taman	Petarukan	Ulujami
Bandeng (kg)	231.686	255.273	414.296	9.217.311
Udang Windu (kg)	105	116	188	4.178
Udang Putih (kg)	3.765	4.148	6.733	149.789
Udang Vanamae (kg)	72.817	80.230	130.210	2.896.918
Kepiting (kg)	9.147	10.078	16.356	363.896
Nila salin (kg)	16.700	18.401	29.863	664.405

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.1.3.13 Target dan Realisasi Kinerja Pelayanan

Keberhasilan kinerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang dapat dilihat dari pencapaian kinerja pelayanan dan anggaran. Indikator kinerja pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu tahun 2020-2024 mengacu pada Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dengan tujuan perangkat daerah Meningkatkan perbaikan gizi masyarakat dan Meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi berbasis potensi lokal. Dalam pelaksanaan pelayanan selama 5 (lima) tahun yang telah berlalu, pelaksanaan capaian kinerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan tahun 2020-2024, sesuai Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 tersaji pada tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.16

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun					Pertumbuhan Kinerja				Rata-Rata
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase persediaan pangan	%	50	20	20	20	75	-60	0	0	275	53,75
2	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap pdrb	%	27,02	27,04	26,49	25,93	-	0,07	-2,03	-2,11	0	-1,019
3	Persentase infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	%	16,21	16,05	18,47	18,47	18,47	-0,99	15,08	0	0	3,5227
4	Skor PPH	Angka	92,6	93,5	95,5	96,3	95,49	0,97	2,14	0,84	-0,84	0,7769
5	Persentase tertanganinya kejadian kerawanan pangan	%	34,28	34,28	25,71	22,86	22,86	0,00	33	12,47	0	11,45
6	Produktivitas Padi	Kw/ha	63,27	60,64	63,32	62,31	62,09	-4,16	4,42	-1,60	-0,35	-0,421
7	Produksi Kopi	kg	543.070	548.010	479.960	444.276	508.088,40	0,91	-12,42	-7,43	14,36	-1,145
8	Produksi Daging Dan Telur	kg	16.921.223	16.140.418	16.505.613	16.484.284	18.746.661	-4,61	2,26	-0,13	13,72	2,8109
9	Produksi perikanan tangkap	Kg	18.096.881	18.396.293	21.803.637	22.366.854	21.009.034	299.412	3.407.344	563.217	-1.357.820	728.038
10	Produksi perikanan budidaya	Kg	17.800.168	18.729.495	18.825.767	19.274.111	19.924.806	929.327	96.272	448.344	650.695	531.160
11	Produksi hasil olahan perikanan	Kg	11.360.484	11.372.409	12.013.200	12.346.255	13.212.545	11.925	640.791	333.055	866.290	463.015

https://jdih.pemalangkab.go.id

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang tahun 2020–2024 menunjukkan tren yang cukup baik dan stabil. Terdapat 8 indikator dari 11 indikator yang mengalami kenaikan yaitu :

1. Persentase persediaan pangan mengalami peningkatan dari 50 % pada tahun 2020 menjadi 75 % pada tahun 2024, salah satu faktor penunjang keberhasilan pencapaian tersebut yaitu adanya dukungan anggaran dari DAU Insentif Fiskal pada Tahun 2024 sebesar Rp.102.000.000,- atau sebanyak 6 Ton beras.
2. Persentase infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan mengalami peningkatan dari 16,21 % pada tahun 2020 menjadi 18,47 % pada tahun 2024, namun capaian tersebut belum memenuhi target yang diharapkan karena saat ini pembelian beras sudah lebih mudah dilakukan oleh masyarakat sejalan dengan semakin berkembang dan menjamurnya warung kelontong, bahkan swalayan mini sudah masuk ke desa-desa. Selain itu, belum adanya insentif pengelolaan lumbung pangan menjadi salah satu alasan tidak berkembangnya lumbung pangan.
3. Skor PPH mengalami peningkatan dari 92,6 pada tahun 2020 menjadi 95,49 pada tahun 2024, capaian skor PPH sudah mencapai target artinya mutu penyediaan dan atau konsumsi pangan semakin seimbang.
4. Persentase tertanganinya kejadian kerawanan pangan mengalami penurunan dari 34,28 % pada tahun 2020 menjadi 22,86 % pada tahun 2024, meskipun terjadi penurunan angka, hal ini justru menunjukkan kinerja yang positif, karena menggambarkan berkurangnya jumlah wilayah atau rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan. Salah satu faktor penunjang keberhasilan pencapaian tersebut yaitu adanya intervensi bantuan fisik maupun pembinaan dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
5. Produksi daging dan telur mengalami peningkatan dari 16.140.418 kg pada tahun 2021 menjadi 18.746.661 kg pada tahun 2024, salah satu faktor penunjang keberhasilan pencapaian pada tahun 2024 yaitu adanya pemotongan ternak yang signifikan untuk mencukupi permintaan pasar.
6. Produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan dari 18.096.881 Kg pada tahun 2021 menjadi 21.009.34 Kg pada tahun 2024 atau sebesar 13,9 %, hal tersebut didukung adanya penggunaan alat tangkap yang tepat dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

manajemen penangkapan yang berkelanjutan seperti jumlah trip dan kapal.

Peningkatan produksi perikanan tangkap di tahun 2023 sebesar 22.366,854 Ton dibanding tahun 2022 sebesar 21.803,637 Ton adalah 2,58%, mengalami penurunan sebesar 15,94%, jika dibandingkan dengan peningkatan produksi perikanan tangkap di tahun 2021 sebesar 18.396,254 Ton dibanding tahun 2022 sebesar 21.803,637 Ton adalah 18,52%. Capaian ini masih dibawah realisasi produksi perikanan tangkap di Kota Tegal di tahun 2022 yaitu sebesar 32.060 Ton. Hal ini dikarenakan di Kota Tegal terdapat salah satu pelabuhan perikanan samudra yang mana intensitas kapal perikanan diatas 30 GT yang melakukan bongkar muat hasil tangkapan ikan cukup banyak, selain daripada itu di pelabuhan ini juga terdapat cold storage. Fasilitas cold storage sangat mendukung kestabilan harga ikan di tempat pelelangan ikan untuk nelayan.

Terdapat 5 (lima) tempat pelelangan ikan di Kabupaten Pemalang yang masih aktif dengan produktivitas yang tinggi di tahun 2023, diantaranya: TPI Tanjungsari (Kelurahan Sugihwaras) (2.989,38 Ton), TPI Asemdoyong (Desa Asemdoyong) (14.814,81 Ton), TPI Nyamplungsari (Desa Nyamplungsari) (165,43 Ton), TPI Ketapang (Desa Ketapang) (3.168,62 Ton), dan TPI Mojo (Desa Mojo) (1.228,63 Ton).

Pelaku perdagangan/pelelangan ikan yang melakukan aktivitas pelelangan ikan ditempat pelelangan ikan, sebagai berikut: TPI Tanjungsari (883 Nelayan) (1023 Kapal Motor Tempel), TPI Asemdoyong (1086 Nelayan) (1278 Kapal Motor), TPI Nyamplungsari (143 Nelayan) (149 Kapal), TPI Ketapang (282 Nelayan) (297 kapal), dan TPI Mojo (443 Nelayan) (468 Kapal). Kelompok 5 besar hasil tangkapan yang dilelangkan di seluruh TPI, diantaranya: 1)Cumi2, 2)Peci, 3)Tembang, 4)Teri, dan 5)Beloso.

Aktivitas penyelenggaraan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan dilakukan dengan metode MoU antara Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang dengan Koperasi di Bidang Perikanan, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 62 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Terdapat 2 (dua) Koperasi yang berafiliasi yaitu KUD Mina Misoyo Sari dan KUD Mina Misoyo Makmur. Koperasi tersebut dalam penyelenggaraan pelelangan ikan selain melaporkan jumlah produksi pelelangan, juga melaporkan retribusi dari hasil pelelangan serta pelaku

https://jdih.pemalangkab.go.id

perdagangan/pelelangan.

Pada tahun 2023, retribusi daerah dari tempat pelelangan ikan di Kabupaten Pemalang mencapai Rp. 3.574.609.124,-, dengan rincian sebagai berikut: TPI Tanjungsari (Rp. 721.189.835,-), TPI Asemdoyong (Rp. 2.160.240.753,-), TPI Nyamplungsari (Rp. 23.962.121,-), TPI Ketapang (Rp. 301.636.986,-), dan TPI Mojo (Rp. 367.579.429,-).

7. Produksi perikanan budidaya mengalami kenaikan sebesar 10, 66 % dari tahun 2021 ke tahun 2024, hal tersebut didukung adanya fasilitasi bantuan sarana budidaya berupa percontohan budidaya dan peningkatan kualitas benih dan pakan.

   Peningkatan produksi perikanan budidaya (pembesaran) di tahun 2023 sebesar 19.274,111 Ton dibanding tahun 2022 sebesar 18.825,767 Ton adalah 2%, mengalami kenaikan tipis sebesar 1%, jika dibandingkan dengan peningkatan produksi perikanan budidaya di tahun 2021 sebesar 18.729,495 Ton dibanding tahun 2022 sebesar 18.825,767 Ton adalah 1%. Capaian ini masih dibawah realisasi produksi perikanan budidaya (pembesaran) di Kabupaten Brebes di tahun 2023 yaitu sebesar 74.934,945 Ton. Hal ini dikarenakan di Kabupaten Brebes didukung vegetasi mangrove yang tumbuh subur yang mana menjadi barometer plasma nutfah yang masih baik untuk berkembang biaknya berbagai jenis ikan, dan biofilter alami yang baik untuk limbah terutama limbah dari tambak budidaya ikan. Lahan potensial budidaya ikan yang aktif dengan produktivitas tinggi dan masa panen teratur di Kabupaten Pemalang, terdiri dari: tambak bandeng +/- 1.728 ha, tambak udang vanamae pola intensif +/- 185,5 ha, tambak udang vanamae pola tradisional +/- 38 ha, kolam budidaya +/- 28,065 ha, dan tambak kepiting soka +/- 12 ha.

   Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 terdapat kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi berupa kawasan strategis PETA IKAN yang berperan dalam meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil perikanan, meliputi : Kecamatan Pemalang, Taman, Ulujami, dan Petarukan. Komoditas unggulan budidaya ikan yang dihasilkan pada PETA IKAN, sebagai berikut: Kecamatan Pemalang; Bandeng 231,686 Ton, Kecamatan Taman; Bandeng 255,273 Ton, Kecamatan Petarukan; Bandeng 414,296 Ton, dan Kecamatan Ulujami; Vanamae 9.217,311 Ton.

https://jdih.pemalangkab.go.id

8. Produksi hasil olahan perikanan pada tahun 2021 sebesar 11.360.484 kg menjadi 13.212.545 kg pada tahun 2024 atau sebesar 14,01 %, peningkatan tersebut didukung oleh kualitas bahan baku, adanya diversifikasi hasil olahan serta adanya digitalisasi pemasaran produk olahan hasil perikanan.

   Peningkatan produksi olahan hasil perikanan di tahun 2023 sebesar 12.346,255 Ton dibanding tahun 2022 sebesar 12.013,200 Ton adalah 3%, mengalami penurunan sebesar 2%, jika dibandingkan dengan peningkatan olahan hasil perikanan di tahun 2021 sebesar 11.372,409 Ton dibanding tahun 2022 sebesar 12.013,200 Ton adalah 5%.

   Pada tahun 2023 Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang menargetkan tingkat konsumsi ikan 34,50 Kg/Kapita/Tahun adapun realisasinya adalah 35,24 Kg/Kapita/Tahun. Capaian ini masih dibawah angka konsumsi ikan Provinsi Jawa Tengah 37,48 Kg/Kapita/Tahun, dan Kota Tegal 37,22 Kg/Kapita/Tahun. Tingkat konsumsi ikan terendah selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terjadi pada tahun 2021 sebesar 30,27 Kg/Kapita/Tahun, hal ini dikarenakan pandemi COVID-19.

Sedangkan 3 indikator lainnya belum memenuhi target sesuai yang diharapkan yaitu :

1. Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap pdrb mengalami penurunan dari 27,02 % pada tahun 2020 menjadi 25,93 % pada tahun 2023. Meskipun mengalami penurunan secara persentase, peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Pemalang masih dipegang oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kategori ini tetap menjadi penyokong utama perekonomian daerah, mengingat besarnya keterlibatan penduduk dalam aktivitas pertanian serta peran strategisnya dalam penyediaan pangan. Sejak tahun 2019 hingga 2023, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan kinerja yang relatif stabil dan tangguh, bahkan tidak terlalu terdampak oleh pandemi COVID-19 baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Hal ini disebabkan karena sektor ini berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat yang tetap tinggi meskipun terjadi pembatasan mobilitas maupun perlambatan ekonomi. Stabilitas ini menjadi landasan penting dalam menjaga ketahanan pangan dan perekonomian lokal selama masa krisis.
2. Produktivitas padi mengalami penurunan dari 63,27 kw/ha pada tahun

https://jdih.pemalangkab.go.id

2020 menjadi 62,09 kw/ha pada tahun 2024, penurunan ini dikarenakan banyaknya hama tikus, hama opt wereng batang coklat dan penggerek batang yang menyerang tanaman padi menyebabkan tanaman padi rusak sehingga produksi padi menurun. Selain hal tersebut, dampak perubahan iklim elnino/ kekeringan juga masih menjadi penyebab penurunan produksi padi terutama pada Tahun 2023 dan 2024.

3. Produksi kopi mengalami penurunan dari 543.070 kg pada tahun 2020 menjadi 508.088,4 kg pada tahun 2024, penurunan ini disebabkan karena tanaman kopi ikut terdampak fenomena El Nino yang menyebabkan produktivitas kopi menurun karena banyak tanaman kopi tidak berkembang maksimal, warnanya berubah menjadi kuning kemerahan dan akhirnya gugur. Sehingga mengakibatkan buah kopi yang dipanen menjadi sedikit.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.17
Evaluasi Indikator Kinerja Pelayanan Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra	Satuan	Target Renstra PD Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-					Persentase Capaian Pada Tahun ke – (%)			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024
1	Persentase persediaan pangan	%	25	25	25	25	25	25	20	20	20	75		80	80	80	300
2	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap pdrb	%	2,56	2,57	2,58	2,59	2,6	2,6	27,04	26,49	25,93	-					
3	Persentase infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	%	18,46	20,72	22,97	25,22	27,47	29,72	16,05	18,47	18,47	18,47		86,94	89,14	89,14	89,14
4	Skor PPH	Angka	93,1	93,6	94,1	94,7	95,2	95,2	93,5	95,5	96,3	95,49		100,43	102,03	102,34	100,83
5	Persentase tertanganinya kejadian kerawanan pangan	%	34,28	31,42	28,57	25,71	22,85	20	34,28	25,71	22,86	22,86		100	81,83	80,01	88,91
6	produktivitas padi	Kw/ha	57,71	57,73	57,75	57,77	57,79	57,81	60,64	63,32	62,31	62,09		105,08	109,68	107,9	107,48
7	produksi kopi	kg	435.000	438.000	441.000	445.000	450.000	456.000	548.010	479.960	444.276	508.088,4		125,98	109,58	100,74	114,18
8	produksi daging dan telur	kg	15.390.367	15.503.050	15.616.756	15.731.496	15.847.280	15.964.119	16.140.418	16.505.613	16.484.284	18.746.661		104,87	106,47	105,56	119,17
9	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Pertanian	Indeks	81	81,5	82	82,5	83	83,5	84	84,125	87,87	84,83		103,70	103,22	107,16	102,82
10	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Perikanan	Indeks	NA	NA	NA	NA	NA	NA	83,45	84,07	85,24	86,67		100,00	100,00	100,00	100,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra	Satuan	Target Renstra PD Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-					Persentase Capaian Pada Tahun ke – (%)			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024
11	Nilai Sakip Pertanian	Nilai	58	60	61	62	63	64	61,68	63,55	65,4	66,2		106,34	105,92	107,21	106,78
12	Nilai Sakip Perikanan	Nilai	43,00	45,00	47,00	49,00	51,00	53,00	51,60	60,95	63,10	65,09		120,00	135,44	134,26	132,84
13	Prosentase lumbung pangan aktif	%	18,46	20,72	22,97	25,22	27,47	29,72	16,05	18,47	18,47	18,47		86,94	89,14	89,14	89,14
14	Jumlah ketersediaan pangan	ton	10	20	20	20	20	20	10	4	4	15,72		100	20	20	78,6
15	Prosentase penurunan desa rawan pangan	%	34,28	31,42	28,57	25,71	22,85	20	34,28	25,71	22,86	22,86		100	81,83	80,01	88,91
16	Prosentase pangan segar yang aman	%	80	80	80	80	80	80	100	100	95	94,7		125	125	118,75	118,38
17	Prosentase sarana pertanian sesuai kebutuhan	%	80	80	80	80	80	80	80	100	89,19	100		100	125	111,49	125
18	Prosentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	%	20	20	20	20	20	20	17	18,75	21,30	33,28		85	93,75	106,5	166,4
19	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	10,96	10,96	10,96	10,96	10,96	10,96	10,35	10,64	-6	-15		105,89	103,01	182,67	136,86
20	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	%	20	20	20	20	20	20	20	33,30	32,98	53,97		100	166,5	164,9	269,85
21	Prosentase kelompok tani aktif	%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		100	100	100	100
22	Persentase TPI yang memenuhi standar	%	64	69	74	79	84	89	67	71	74	79		104,69	102,90	100,00	100,00
23	Persentase sarana dan prasarana budidaya yang tertangani	%	18	21	24	27	30	33	20	21	24	27		111,11	100,00	100,00	100,00
24	Persentase peningkatan pengawasan PUD	%	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		100,00	100,00	100,00	100,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra	Satuan	Target Renstra PD Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-					Persentase Capaian Pada Tahun ke – (%)			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024
25	Persentase unit pengolahan dan pemasaran ikan yang aman pangan	%	53,87	58,87	63,87	68,87	73,87	78,87	53,87	58,87	63,87	68,87		100,00	100,00	100,00	100,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pencapaian target kinerja tidak lepas dari faktor pendanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 2021-2026. Adapun pendanaan program beserta realisasinya secara rinci tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.18
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

Program	Rencana Anggaran Pada Tahun ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- (Rp.000)				Presentase Realisasi Anggaran (%)			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	542.211,500	3.210.000	2.290.000	5.000	309.200	309.200	540.029	3.100.934	2.286.800	5.000	99,60	96,60	99,86	100
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	866.969,350	655.000	569.050	459.050	1.900.450	1.900.450	866.138,850	648.295,750	548.312	451.143,200	99,90	98,98	96,36	98,28
Program Penanganan Kerawanan Pangan	24.255,700	50.000	35.000	72.500	55.350	55.350	24.182,700	50.000	35.000	72.500	99,70	100	100	100
Program Pengawasan Keamanan Pangan	44.940	80.000	60.000	30.450	28.000	28.000	42.751,550	79.847,600	60.000	30.450	95,13	99,81	100	100
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.797.423,36	25.624.765,00	23.017.686,75	24.962.492,85	26.037.667,00	26.037.667,00	23.706.471,10	23.166.131,96	21.039.512,13	22.316.572,50	98,06	90,73	94,93	86,56
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.896.580	5.011.458,556	5.723.927	2.437.272,200	1.919.795	1.919.795	1.858.294,856	4.694.657,660	5.335.184,600	2.361.345,154	97,98	93,68	93,21	96,88
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	8.473.278	4.548.665,500	6.102.987	8.148.934	3.444.500	3.444.500	8.458.326,770	4.382.062	6.065.226,257	8.101.051,774	99,82	96,34	99,38	99,41

https://jdih.pemalangkab.go.id

Program	Rencana Anggaran Pada Tahun ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- (Rp.000)				Presentase Realisasi Anggaran (%)			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	233.718,200	614.291,444	2.253.056	610.650	1.004.200	1.004.200	229.458,790	614.177,357	2.250.298,364	609.084,292	98,18	99,98	99,88	99,74
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	323.362,400	534.562	408.317	311.896	381.600	381.600	322.930,300	531.601,350	408.292,500	309.416	99,87	99,45	99,99	99,20
Program Penyuluhan Pertanian	1.093.217,370	622.154,500	1.869.520	3.493.733.000	3.406.715.000	3.406.715.000	1.089.178.404	615.041.599	1.866.769.200	3.464.780.772	99,63	98,86	99,85	99,17
Program pengelolaan perikanan tangkap	1.404.501	1.404.501	1.404.501	1.404.501	1.404.501	1.404.501	1.271.110	2.602.394	3.298.625	2.359.438	90,50	185,29	234,86	167,99
Program pengelolaan perikanan budidaya	3.376.496	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.755.000	2.760.000	2.007.408	700.239	3.643.811	4.513.100	59,45	25,46	132,50	164,11
Program pengawasan dan sumberdaya kelautan dan perikanan	194.350	195.000	200.000	205.000	210.000	215.000	139.121	71.219	49.999	134.952	71,58	36,52	25,00	65,83
Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	1.095.000	2.000.000	2.000.000	2.005.000	1.345.300	1.345.300	713.824	342.830	882.672	959.194	65,19	17,14	44,13	47,84

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan selama lima tahun terakhir menunjukkan capaian kinerja yang mencerminkan kontribusi sektor pertanian pangan dan perikanan terhadap pendapatan daerah serta menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan pendapatan di periode berikutnya. Adapun target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021 - 2024 secara rinci tercantum pada tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.19

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Pemalang

Uraian	2021			2022			2023			2024		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
Lain-Lain PAD yang sah (Penyewaan Tanah)	170.000.000	184.375.000	108,46	170.000.000	180.362.500	106,10	195.000.000	198.678.500	101,89	200.000.000	202.546.500	101,27
Retribusi Rumah Potong Hewan	70.000.000	58.768.000	83,95	70.000.000	57.904.000	82,72	70.000.000	56.988.000	81,41	75.000.000	98.470.000	131,29
Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan	60.000.000	68.600.000	114,33	85.000.000	89.025.000	104,74	90.000.000	90.625.000	100,69	100.000.000	78.588.000	78,59
Retribusi Kekayaan Daerah							50.000.000	54.268.144	108,54	50.000.000	41.999.000	84,00
Penyediaan Fasilitas Tempat Pelelangan Ikan							3.820.000.000	3.574.609.124	93,58	4.000.000.000	2.725.798.826	68,14
JUMLAH	**300.000.000**	**311.743.000**	**103,91**	**325.000.000**	**327.291.500**	**100,71**	**4.225.000.000**	**3.975.168.768**	**94,08**	**4.425.000.000**	**3.147.402.326**	**71,13**

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang adalah masyarakat yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam urusan pemerintahan di bidang pangan dan pertanian. Kelompok ini meliputi individu, kelompok, serta lembaga yang menjadi bagian dari sistem pertanian daerah, baik sebagai pelaku usaha, penerima manfaat, maupun mitra kerja pemerintah. Secara lebih rinci, kelompok sasaran pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Petani dan Kelompok Tani

   Masyarakat yang secara aktif melakukan kegiatan budidaya tanaman pangan dan hortikultura, baik secara perorangan maupun yang tergabung dalam kelompok tani.
2. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

   Organisasi atau forum yang terdiri atas beberapa kelompok tani yang bekerja sama dalam pengelolaan sumber daya, penanganan pascapanen, distribusi, dan pemasaran hasil pertanian.
3. Pelaku Usaha di Sektor Pertanian

   Termasuk di dalamnya pelaku usaha agribisnis, pelaku UMKM pertanian, distributor sarana produksi pertanian, dan pelaku industri pengolahan hasil pertanian.
4. Kios Pupuk Lengkap

   Kios Pupuk Lengkap (KPL) adalah kios resmi yang ditunjuk untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani sesuai dengan alokasi dan ketentuan pemerintah. Setiap KPL diwajibkan memenuhi standar pelayanan, seperti memiliki izin resmi, menjual pupuk sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), serta melayani petani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
5. Penyuluh Pertanian dan Tenaga Teknis

   Aparatur dan non-aparatur yang berperan dalam proses penyuluhan, pembinaan, serta pemberdayaan petani untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian petani.
6. Penyuluh perikanan

   Penyuluh perikanan adalah tenaga fungsional yang memiliki tugas utama memberikan bimbingan, pendampingan, serta penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, pengolah,

https://jdih.pemalangkab.go.id

dan pemasar hasil perikanan.

7. Lembaga Pendidikan dan Penelitian

   Institusi yang terlibat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian yang dapat bekerja sama dalam peningkatan kapasitas SDM pertanian dan inovasi teknologi.

8. Masyarakat Umum dan Konsumen

   Termasuk masyarakat luas sebagai penerima manfaat dari hasil pembangunan pertanian, baik dalam bentuk ketersediaan pangan maupun stabilitas harga.

9. Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)

   Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) di Kabupaten Pemalang hadir sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian modern. UPJA dikelola oleh kelompok tani atau gabungan kelompok tani (gapoktan) yang menyediakan layanan seperti pengolahan lahan, tanam, panen, hingga pascapanen secara sewa kepada petani.

10. Organisasi Masyarakat Pertanian

    Organisasi masyarakat pertanian seperti HPDKI (Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia), HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan), serta berbagai asosiasi Kelompok Wanita Tani (KWT) memiliki peran strategis dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Pemalang. Mereka menjadi mitra pemerintah dalam peningkatan kapasitas petani, advokasi kebijakan, akses teknologi, dan pemasaran hasil pertanian. HPDKI mendorong profesionalisme peternak rakyat, sementara HKTI memperkuat posisi petani dalam tata kelola pertanian nasional. KTNA berfungsi sebagai jembatan antara petani dan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi serta mendukung regenerasi petani. Sementara itu, KWT aktif mengembangkan pertanian keluarga, pangan lokal, dan usaha ekonomi produktif berbasis rumah tangga.

11. Brigade Pangan

    Brigade Pangan adalah kelompok tani milenial yang diprioritaskan oleh Kementerian Pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan melalui pendekatan modern dan terstruktur. Setiap brigade terdiri dari sekitar 15 petani muda (termasuk mahasiswa dan alumni SMK/Polbangtan), berkomitmen minimal 5 tahun serta bertanggung jawab mengelola lahan

https://jdih.pemalangkab.go.id

seluas 150–200 hektar. Kelompok ini ditargetkan memenuhi kriteria seperti pendidikan dasar, jiwa kewirausahaan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah . Anggota brigade dibekali teknologi pertanian modern alsintan (traktor, combine harvester), sistem pompanisasi dan manajemen lahan optimal (Oplah) dengan tujuan meningkatkan intensitas tanam (IP) dari 1 kali menjadi 2–3 kali per musim, serta meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani.

12. Nelayan

    Melakukan pemberdayaan nelayan dengan focus pada pemberian pelatihan, bantuan serta fasilitasi kepada nelayan, diantaranya; pelatihan penggunaan Alat Penangkapan Ikan (API) ramah lingkungan, bantuan fish basket dan cool box, serta fasilitasi kartu asuransi nelayan, Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) dan BBM solar bersubsidi yang disalurkan kepada nelayan kecil yang mana terdaftar dalam KUSUKA atau memiliki Kartu Nelayan Jawa Tengah. Selain daripada itu guna meningkatkan kapasitas usaha nelayan, Dinas Perikanan juga memberikan fasilitasi kelembagaan berupa pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB).

13. Pembudidaya Ikan

    Melakukan pemberdayaan pembudidaya ikan dengan focus pada pemberian pelatihan, bantuan serta fasilitasi kepada pembudidaya, diantaranya; pelatihan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), bantuan benih unggul dan pakan berkualitas, serta fasilitasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT). Dinas Perikanan juga memberikan fasilitasi kelembagaan berupa pembentukan Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) yang salah satunya difasilitasi melalui program seperti Gerakan Pakan Ikan Mandiri (GERPARI), yang bertujuan untuk mengurangi biaya produksi dengan memproduksi pakan sendiri

14. Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan

    Melakukan pemberdayaan pengolah dan pemasar hasil perikanan dengan focus pada pemberian pelatihan, bantuan serta fasilitasi kepada pembudidaya, diantaranya; pelatihan diversifikasi olahan hasil perikanan melalui pemberian nilai tambah (value added) pada produk olahan, bantuan sarana dan prasarana mendukung rantai dingin (cold chain) dan rehab. rumah produksi, serta fasilitasi Sertifikat Pengolahan Ikan (SKP). Selain itu, juga memberikan fasilitasi kelembagaan berupa pembentukan Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (POKLAHSAR).

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.1.5 Mitra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang bermitra dengan pihak pihak yang dapat berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan dan peningkatan kinerja. Secara lebih rinci, mitra kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, memverifikasi izin usaha pertanian;
2. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, melayani informasi pasar, sinergitas pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi, kolaborasi dan sinergitas pendampingan UMKM Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura (kewirausahaan, pemasaran, perijinan) dan Melakukan KIE (komunikasi, informasi, edukasi), Desinfeksi, Pengobatan dan Vaksinasi di wilayah Pasar Hewan serta melakukan pengawasan dan pembinaan bersama kepada para penjual bahan pangan asal hewan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Pengelolaan infrastruktur irigasi pertanian, normalisasi saluran air, sinkronisasi data luas baku sawah dan montoring alih fungsi lahan;
4. Dinas Kesehatan, sinkronisasi data untuk penyusunan Peta Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) dan tim Epidemiologi Zoonosis Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan kewaspadaan penularan penyakit Zoonosis;
5. Dinas Sosial KBPP, sinkronisasi data untuk penyusunan Peta Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) dan pelayanan terpadu kesehatan hewan pada ternak yang tergabung dalam KUBE (kelompok usaha bersama) binaan dari Dinsos KBPP Pemalang;
6. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dan Perkebunan Provinsi Jateng, menguji kualitas benih;
7. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, pendampingan dan pemeriksaan kesehatan hewan pada ternak bantuan Bupati Pemalang dan bantuan kemasyarakatan (Banmas) Presiden tahun 2025;
8. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi;
9. Kementerian Agama, Melaksanakan KIE (komunikasi, informasi, edukasi) mengenai praktik juru sembelih halal dan kesejahteraan hewan kepada

https://jdih.pemalangkab.go.id

Takmir masjid di Kabupaten Pemalang;

10. Polres Pemalang, mengawasi distribusi pupuk bersubsidi, sinergi dalam program tanam jagung dan ketahanan pangan serta pendataan ternak dan KIE (komunikasi, informasi, edukasi) kepada pemilik ternak agar bersedia dilakukan vaksin PMK;
11. Kodim 0711 Pemalang, mengawasi distribusi pupuk bersubsidi, sinergi dalam program tanam jagung dan ketahanan pangan serta melakukan sosialisasi mengenai management kesehatan ternak kepada masyarakat;
12. Badan Pusat Statistik, kolaborasi dan sinergitas data pertanian;
13. Badan Pertanahan Nasional, sinkronisasi data lahan sawah dilindungi dan monitoring alih fungsi lahan;
14. PT. Pupuk Indonesia, pengelolaan pendistribusian pupuk bersubsidi.
15. Koperasi Desa Merah Putih adalah inisiatif nasional yang mulai dirintis di desa-desa Kabupaten Pemalang sebagai bagian dari sistem ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat desa. Koperasi ini berperan sebagai offtaker, yakni menyerap dan menyimpan hasil pertanian lokal seperti gabah, sayuran, dan komoditas lainnya secara langsung dari petani desa, tanpa perantara tengkulak.
16. Koperasi daerah yang bergerak di bidang perikanan (KUD Mina Misoyo Sari Tanjungsari dan KUD Mina Misoyo Makmur Asemdoyong), melaksanakan aktivitas penyelenggaraan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan dilakukan melalui metode Memorandum of Understanding (MoU) dengan koperasi daerah yang bergerak di Bidang Perikanan. Guna mendukung kelancaran aktivitas penyelenggaraan pelelangan ikan tersebut, Dinas Perikanan melakukan pembinaan kepada Karyawan Koperasi serta memberikan bantuan sarana dan prasarana diantaranya: rehab. TPI, fish basket, cool box, timbangan, genset alcon, serta layanan konsultasi penyelenggaraan pelelangan ikan dalam rangka mendukung pendapatan asli daerah.

    Koperasi Perikanan Darat dan 3 (tiga) Tempat Pelelangan Hasil Tambak di Kabupaten Pemalang yang masih aktif dengan produktivitas yang tinggi, sebagai berikut:

    1. KPD Mino Rejo, Ds. Limbangan
    2. KPD Mino Tulus, Ds. Mojo
    3. KPD Mino Karya Mukti, Ds. Ketapang
    4. KPD Sumber Hidup, Ds. Kendalrejo

https://jdih.pemalangkab.go.id

5. KPD Mino Mulya, Ds. Pesantren
6. KPD Mino Raharjo, Ds. Tasikrejo
7. TPHT Blok Krantil, Ds. Pesantren
8. TPHT Mino Rejo, Ds. Limbangan
9. TPHT Mino Tulus, Ds. Mojo.

17. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Kerjasama ini dilakukan dalam rangka mendukung produktivitas komoditas lokal daerah, salah satu diantaranya: Ikan Bandeng dan olahannya. Mitra lainnya selain koperasi daerah dan BUMDES, diantaranya: Perguruan Tinggi Unsoed Purwokerto dalam pendataan SDI perairan umum serta bank daerah BPD Jateng dalam penyaluran bantuan sosial bagi nelayan kecil terdampak cuaca ekstrim.

2.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

Salah satu indikator kinerja dalam keberhasilan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang adalah tumbuhnya ekonomi masyarakat dan menurunnyaf laju inflasi. Pertumbuhan ekonomi diupayakan dengan meningkatkan produktivitas dan dan nilai ekonomi berbasis potensi lokal serta meningkatkan realisasi invenstasi daerah. Capaian kinerja yang lainnya yaitu meningkatnya kemandirian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Sebagai instansi instansi pelaksana urusan pemerintah bidang pertanian dan pangan, dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanannya Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap kerberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kabupaten Pemalang. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Adapun beberapa permasalahan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dalam pembangunan pertanian dan pangan selama periode 5 (lima) tahun dari tahun 2021 sampai dengan 2026, adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan Bidang Ketahanan Pangan

https://jdih.pemalangkab.go.id

a. Belum meratanya keterjangkauan pangan;
b. Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan;
c. Belum optimalnya pengembangan industri pangan lokal;
d. Belum optimalnya stabilisasi pasokan dan harga pangan;
e. Masih terjadi kerawanan pangan di beberapa wilayah pedesaan dan perbatasan hutan, terutama saat musim kemarau panjang;
f. Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) yang berbasis kearifan pangan lokal;
g. Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan registrasi PSAT.

2. Permasalahan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
   a. Minimnya Mindset Entrepreuner di Sub Sistem Hilir (Pengolahan dan Pemasaran) Pelaku Usaha komoditas TPH di Kabupaten Pemalang;
   b. Minimnya Fasilitasi Sarana Pengolahan dan Pemasaran untuk Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil TPH;
   c. Belum optimalnya pengendalian penyakit tanaman pangan;
   d. Keterbatasan akses dan biaya terhadap alat pertanian modern.
3. Permasalahan Bidang Sarana dan Prasarana
   a. Adanya alih fungsi lahan untuk industri dan permukiman;
   b. Banyaknya infrastruktur pertanian (Jaringan Irigasi, Jalan Usaha Tani, Dam Parit, Sumur Dalam, dll) dalam kondisi rusak;
   c. Belum tercukupinya penyediaan alat dan mesin pertanian;
   d. Belum optimalnya perencanaan alokasi alsintan dalam pemerataan alsintan di Kabupaten Pemalang;
   e. Belum optimalnya pelayanan teknis perawatan alsintan;
   f. Belum optimalnya pengembangan SDM alsintan;
   g. Belum optimalnya pengawasan dan pemanfaatan Alsintan karena Poktan belum membentuk UPJA (Usaha Pelayanan Jasa Alsintan);
   h. Masih kurangnya ketersediaan air untuk irigasi pertanian;
   i. Masih tingginya tingkat ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik.
4. Permasalahan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
   a. Masih rendahnya capaian vaksinasi PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) pada ternak di Kabupaten Pemalang;
   b. Sebagian peternak masih menggunakan pola tradisional (mindset

https://jdih.pemalangkab.go.id

masih tradisional / sebagai usaha sampingan) sehingga pengelolaan usaha hanya sekedar ngisi waktu luang dan ternak dianggap sebagai tabungan saja sehingga tidak berkembang (cenderung stagnan), hanya sebagian kecil peternak yang menjadikan peternakan sebagai usaha utama. Pola teradisional ini terbentuk karena terbatasnya modal yang dimiliki, akses sumberdaya alam (sumber pakan) terbatas, akses pasar terbatas, posisi tawar di pasar yang rendah, akses teknologi peternakan masih rendah;

c. Masih rendahnya penggunaan teknologi dalam pengembangan Peternakan (Transfer embrio, gertak birahi, sinkronisasi estrus, maupun nseminasi buatan).

5. Permasalahan Bidang Perkebunan
   a. Belum tersedianya Bibit Kopi Robusta Lokal;
   b. Kurangnya Produksi Kopi untuk memenuhi kebutuhan pasar;
   c. Terbatasnya tempat penyimpanan pada pascapanen tembakau;
   d. Belum optimalnya pengendalian penyakit perkebunan.
6. Permasalahan Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap
   a. Pemanfaatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) belum berjalan secara optimal;
   b. Terjadi sedimentasi pada alur pelayaran yang menghambat aktivitas nelayan;
   c. Masih terdapat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan;
   d. Potensi perairan umum belum dimanfaatkan secara maksimal;
   e. Pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan masih lemah;
   f. Pendapatan nelayan cenderung fluktuatif dan tidak menentu;
   g. Ketersediaan sarana penangkapan ikan masih terbatas;
   h. Akses terhadap informasi dan teknologi masih rendah di kalangan nelayan;
7. Permasalahan Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya
   a. Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) belum optimal;
   b. Kualitas benih ikan yang digunakan masih rendah;
   c. Daya dukung lahan tambak mengalami penurunan;
   d. Terjadi pendangkalan pada saluran-saluran tambak;
   e. Pengelolaan limbah hasil budidaya belum dilaksanakan secara optimal;
   f. Terjadi pencemaran air pada kawasan tambak;
   g. Beberapa kawasan tambak hilang akibat abrasi dan rob;

https://jdih.pemalangkab.go.id

h. Ketersediaan sarana dan prasarana budidaya masih belum memadai;
i. Harga pakan ikan tergolong tinggi dan membebani pembudidaya,
j. Kapasitas sumber daya manusia di sektor perikanan masih rendah;

8. Permasalahan Bidang Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
   a. Inovasi produk perikanan olahan masih sangat terbatas;
   b. Akses pasar bagi produk perikanan masih terbatas;
   c. Tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap perizinan pengolahan dan pemasaran masih rendah;
   d. Tingkat kesadaran terhadap perizinan usaha perikanan masih rendah
   e. Akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan masih terbatas;
   f. Kualitas produk olahan perikanan masih belum memenuhi standar;
   g. Tingkat konsumsi ikan di masyarakat masih rendah;
   h. Proses pengolahan ikan masih belum higienis dan penggunaan bahan tambahan pangan belum sesuai ketentuan;
   i. Sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan masih minim;
   j. Permodalan untuk usaha pengolahan dan pemasaran masih belum memadai;

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.19

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Urusan	Sub Urusan	Kewenangan	Indikator	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4	5	6	7
Pangan	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota.	Persentase Cadangan Pangan	Belum meratanya ketersediaan dan keterjangkauan pangan dalam kemandirian pangan	Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan	Belum optimalnya Pemanfaatan Lumbung Pangan
	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga;	Konsumsi energi per kapita per hari, Konsumsi protein perkapita per hari		Masih kurangnya pasokan pangan	Belum optimalnya pendistribusian pangan
		b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota			Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) yang berbasis kearifan pangan lokal	Adanya persepsi bahwa pangan lokal tidak modern dan kurang prestise
		c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi				Kurangnya edukasi dan sosialisasi berkelanjutan tentang konsep B2SA
						Belum optimalnya Pemanfaatan Lahan Pekarangan
						Belum optimalnya penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal
		d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.			Belum optimalnya stabilisasi pasokan dan harga pangan	Lemahnya posisi tawar petani
						Rantai pasokan terlalu panjang
	Penanganan Kerawanan Pangan	a. Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota;	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan		Masih terjadi kerawanan pangan di beberapa wilayah pedesaan dan perbatasan hutan, terutama saat musim kemarau panjang	Akses dan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga belum mencukupi
		b. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota;				
		c. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan				
	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar	Persentase produk pangan segar yang		Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha	Kurangnya pengetahuan pedagang dan konsumen

https://jdih.pemalangkab.go.id

Urusan	Sub Urusan	Kewenangan	Indikator	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4	5	6	7
			memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan		untuk melakuksan registrasi PSAT	Pengawasan yang belum merata dan berkelanjutan
Pertanian	Sarana Pertanian	a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian;	Produksi Tanaman Pangan, Produksi Tanaman Hortikultura, Produksi Komoditas Perkebunan, Populasi ternak	Belum optimalnya kontribusi pertanian unggulan dalam pertumbuhan ekonomi	Belum optimalnya penanganan pasca panen dan pengolahan komoditas pertanian	Kurangnya penerapan tekhnologi dan inovasi pasca panen dan pengolahan komoditas pertanian
		b. Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota;				Belum tercukupinya sarana dan prasarana pasca panen dan pengolahan komoditas pertanian
		c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/kota;			Belum optimalnya tekhnologi dan inovasi sistem pemasaran komoditas pertanian	Belum optimalnya fasilitasi pemasaran
		d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;				Belum optimalnya *Business to business* (B2B)
		e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah kabupaten/kota;			Kurangnya inovasi pertanian (dari hulu ke hilir)	Kurangnya implementasi tekhnologi untuk mendukung inovasi
		f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain.				Belum optimalnya perencanaan alokasi alsintan dalam pemerataan alsintan di Kabupaten Pemalang
	Prasarana Pertanian	a. Pengembangan prasarana pertanian;	Prosentase prasarana pertanian dalam kondisi baik		Adanya alih fungsi lahan	Belum diimplementasikannya insentif dan disinsentif pada (Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan) LP2B
		b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah kabupaten/kota;				adanya lahan pertanian yang terkena dampak rob
		c. Pengembangan lahan penggembalaan umum.			Belum maksimalnya pengairan dan akses jalan pertanian	Banyaknya infrastruktur pertanian (Jaringan Irigasi, Jalan Usaha Tani, Dam Parit, Sumur Dalam, dll) dalam kondisi rusak
	Kesehatan Hewan dan Kesehatan	a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan		Belum optimalnya pencegahan dan	Belum tercukupinya ketersediaan obat hewan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Urusan	Sub Urusan	Kewenangan	Indikator	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4	5	6	7
	Masyarakat Veteriner	hewan menular dalam Daerah kabupaten/kota;	Menular Strategis (PHMS)		pengendalian penyakit pertanian	
		b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah kabupaten/kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten/kota;				Kurangnya Sumber Daya Manusia (dokter hewan dan paramedik veteriner)
		c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten/kota;				
		d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;				
		e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.				
	Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota.	Presentase luas areal penanggulangan bencana pertanian		Belum optimalnya pencegahan dan pengendalian penyakit pertanian	Belum tercukupinya ketersediaan obat tanaman
						Kurangnya Sumber Daya Manusia (Pengendali OPT)
					Penurunan tingkat kesuburan tanah	Penggunaan pupuk kimia yang berlebih
	Penyuluhan Pertanian	Peningkatan kapasitas penyuluh dan petani	Persentase kelompok tani kategori utama		Belum optimalnya manajemen kelembagaan petani dan penyuluh pertanian	Database kelembagaan petani tidak *up to date*
						Masih rendahnya partisipasi anggota kelompok tani
						Belum terbangunnya pola pikir kewirausahaan (*entrepreneurship*) petani
						Kurangnya jumlah tenaga penyuluh pertanian
						Belum maksimalnya pendampingan dan pembinaan kepada kelompok tani

https://jdih.pemalangkab.go.id

Urusan	Sub Urusan	Kewenangan	Indikator	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4	5	6	7
Perikanan			Jumlah produksi perikanan tangkap	Belum Optimalnya Produktivitas Perikanan Tangkap	Pemanfaatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) belum berjalan secara optimal.	Banyak Tempat Pelelangan Ikan belum dikelola profesional dan belum digital, mengurangi transparansi dan daya saing.
					Terjadi sedimentasi pada alur pelayaran yang menghambat aktivitas nelayan.	Pendangkalan muara sungai menyulitkan kapal keluar-masuk pelabuhan dan TPI
					Masih terdapat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.	Masih adanya penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem sumber daya ikan perairan
					Potensi perairan umum belum dimanfaatkan secara maksimal.	Potensi perikanan di sungai, waduk, dan rawa belum dikelola secara maksimal
					Pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan masih lemah.	Aktivitas *ilegalfishing* dan *overfishing* sulit dikendalikan karena keterbatasan personel dan sarana pengawasan
					Pendapatan nelayan cenderung fluktuatif dan tidak menentu.	Pada musim paceklik, nelayan tidak memiliki sumber pendapatan alternatif
					Ketersediaan sarana penangkapan ikan masih terbatas.	Kurang memadainya sarana penangkapan ikan/sarana penangkapan belum menunjang dinamika kebutuhan penangkapan yang berkembang
					Akses terhadap informasi dan teknologi masih rendah di kalangan nelayan.	Nelayan belum banyak mengakses teknologi seperti GPS, aplikasi cuaca, atau sistem informasi pasar
					Tingkat kesadaran terhadap perizinan usaha perikanan masih rendah.	Banyak pelaku usaha belum mengurus izin usaha dan izin penangkapan ikan
					Akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan masih terbatas.	Nelayan sulit memperoleh kredit usaha karena keterbatasan jaminan dan literasi keuangan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Urusan	Sub Urusan	Kewenangan	Indikator	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4	5	6	7
			Jumlah produksi perikanan budidaya	Belum Optimalnya Produktivitas Usaha Budidaya Perikanan	Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) belum optimal.	Banyak pembudidaya belum memahami dan melaksanakan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), sehingga kualitas hasil budidaya rendah dan tidak berkelanjutan
					Kualitas benih ikan yang digunakan masih rendah.	Benih yang tidak unggul menyebabkan pertumbuhan ikan tidak optimal, rentan penyakit, dan menurunkan produktivitas
					Daya dukung lahan tambak mengalami penurunan.	Penggunaan lahan budidaya berlebihan dan kurangnya rehabilitasi, lahan tambak menjadi kurang produktif
					Terjadi pendangkalan pada saluran-saluran tambak.	Sirkulasi air dan akses masuk-keluar air laut terhambat, sehingga kualitas lingkungan tambak menurun
					Pengelolaan limbah hasil budidaya belum dilaksanakan secara optimal.	Pengelolaan limbah budidaya yang tidak baik menyebabkan; pencemaran lingkungan, penurunan kualitas air, kerusakan ekosistem pesisir, serta pencemaran tanah
					Terjadi pencemaran air pada kawasan tambak.	Terdapat potensi pencemaran sumber air tambak yang berasal dari limbah rumah tangga, pertanian, atau aktivitas industri yang mengganggu kesehatan ikan
					Beberapa kawasan tambak hilang akibat abrasi dan rob.	Erosi garis pantai dan genangan air laut menyebabkan tambak rusak atau hilang secara permanen
					Ketersediaan sarana dan prasarana budidaya masih belum memadai.	Kurangnya sarana dan prasarana budidaya dalam mendukung produktivitas, misalnya; kolam, kincir air, pompa, dan laboratorium kualitas air masih belum mencukupi kebutuhan pembudidaya

https://jdih.pemalangkab.go.id

Urusan	Sub Urusan	Kewenangan	Indikator	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4	5	6	7
					Harga pakan ikan tergolong tinggi dan membebani pembudidaya.	Biaya pakan masih relatif tinggi terhadap hasil budidaya/masih menjadi beban terbesar pembudidaya, dan kenaikannya tidak diimbangi dengan nilai jual ikan
					Kapasitas sumber daya manusia di sektor perikanan masih rendah.	Pembudidaya belum banyak mengikuti pelatihan atau pendampingan teknis
					Inovasi produk perikanan olahan masih sangat terbatas.	Pembudidaya sulit memperoleh kredit usaha karena keterbatasan jaminan dan literasi keuangan
			Jumlah produksi olahan hasil perikanan	Belum Optimalnya Produktivitas Usaha Olahan Hasil Perikanan	Kualitas produk olahan perikanan masih belum memenuhi standar.	Pelaku usaha belum kreatif dalam mengembangkan produk baru berbasis ikan
					Tingkat konsumsi ikan di masyarakat masih rendah.	Teknik pengolahan tradisional tanpa standar kualitas membuat produk kalah bersaing
					Proses pengolahan ikan masih belum higienis dan penggunaan bahan tambahan pangan belum sesuai ketentuan.	Sebagian masyarakat belum menjadikan ikan sebagai makanan pokok sehari-hari
					Akses pasar bagi produk perikanan masih terbatas.	Beberapa pengolah menggunakan bahan berbahaya demi memperpanjang umur simpan atau meningkatkan tampilan
					Sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan masih minim.	Produk olahan sulit menembus pasar modern atau luar daerah karena keterbatasan jaringan dan promosi
					Permodalan untuk usaha pengolahan dan pemasaran masih belum memadai.	Kurangnya ruang produksi, alat pengolahan, dan fasilitas penyimpanan berstandar
					Tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap perizinan	Pelaku usaha skala kecil belum mendapat akses pembiayaan yang memadai

https://jdih.pemalangkab.go.id

Urusan	Sub Urusan	Kewenangan	Indikator	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4	5	6	7
					pengolahan dan pemasaran masih rendah.	
					Tingkat kesadaran terhadap perizinan usaha perikanan masih rendah.	Banyak pelaku usaha belum mengurus izin edar, PIRT, atau sertifikasi halal, yang menghambat perluasan pasar

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis disusun dengan metode diskusi berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, termasuk review terhadap permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah, tujuan dan sasaran RPJMD, serta Renstra Kementerian Pertanian.

Tabel 2.20

Identifikasi Isu-isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lahan Pertanian yang luas	Berkurangnya lahan pertanian yang produktif	Kualitas hidup sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan	Ketahanan Pangan; perdagangan bebas	Ketahanan Pangan; koperasi merah putih	Jawa Tengah menjadi lumbung pangan nasional	Ketahanan pangan dalam kemandirian pangan
Kabupaten Pemalang memiliki potensi unggulan yang sangat beragam dari potensi pertanian pangan, perkebunan, hortikultura dan pertanian	Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan	Belum meratanya distribusi kesejahteraan masyarakat	Produksi dan konsumsi berkelanjutan; perdagangan bebas	Isu sosial : kemiskinan, koperasi merah putih	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, Penurunan Tingkat kemiskinan	kontribusi pertanian dalam meningkatkan perekonomian
	Masih kurangnya pasokan pangan					
	Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) yang berbasis kearifan pangan lokal					
	Belum optimalnya stabilisasi pasokan dan harga pangan					
	Masih terjadi kerawanan pangan di beberapa wilayah pedesaan dan perbatasan hutan, terutama saat musim kemarau panjang					

https://jdih.pemalangkab.go.id

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan registrasi PSAT					
	Belum optimalnya penanganan pasca panen dan pengolahan komoditas pertanian					
	Belum optimalnya tekhnologi dan inovasi sistem pemasaran komoditas pertanian					
	Kurangnya inovasi pertanian (dari hulu ke hilir)					
	Adanya alih fungsi lahan untuk industri dan permukiman					
	Belum maksimalnya pengairan dan akses jalan pertanian					
	Belum optimalnya pencegahan dan pengendalian penyakit pertanian					
	Belum optimalnya manajemen kelembagaan petani dan penyuluh pertanian					
Perikanan Tangkap: Potensi sumber daya ikan di perairan pantai utara Jawa dan perairan umum daratan (sungai, waduk, rawa).	Pemanfaatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) belum berjalan secara optimal	• Ancaman keberlanjutan kualitas dan kuantitas sumber daya air • Peningkatan ancaman risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim	• Dampak perubahan iklim seperti abrasi dan rob mengancam tambak dan nelayan pesisir. • *Overfishing* dan	• Kelangkaan/krisis permukaan air dan air tanah • Peningkatan intensitas bencana hidrometeorologi (banjir dan longsor • Peningkatan	• Pengelolaan dan penyehatan DAS yang dapat meningkatkan jumlah mata air melalui konservasi sumber daya air • Peningkatan kerentanan adaptasi perubahan iklim pada 11 kabupaten kota yang	Belum Optimalnya Produksi Perikanan Tangkap
	Terjadi sedimentasi pada alur pelayaran yang menghambat aktivitas nelayan					
	Masih terdapat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah					

https://jdih.pemalangkab.go.id

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	lingkungan		penangkapan ilegal masih terjadi akibat lemahnya pengawasan. • Pencemaran perairan menurunkan kualitas budidaya dan ekosistem lokal. • Daya saing produk rendah karena belum memenuhi standar mutu dan keamanan pangan. • Konsumsi ikan masih rendah, belum sebanding dengan potensi produksi daerah. • Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan minim di kalangan nelayan dan pembudidaya	permukaan air laut	berada pada kategori cukup rentan	
	Potensi perairan umum belum dimanfaatkan secara maksimal					
	Pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan masih lemah					
	Pendapatan nelayan cenderung fluktuatif dan tidak menentu					
	Ketersediaan sarana penangkapan ikan masih terbatas					
	Akses terhadap informasi dan teknologi masih rendah di kalangan nelayan					
	Akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan masih terbatas					
Perikanan Budidaya: Lahan tambak, kolam air tawar, dan mina padi yang potensial untuk budidaya ikan air tawar dan payau	Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) belum optimal					Belum Optimalnya Produktivitas Usaha Budidaya Perikanan
	Kualitas benih ikan yang digunakan masih rendah					
	Daya dukung lahan tambak mengalami penurunan					
	Terjadi pendangkalan pada saluran-saluran tambak					
	Pengelolaan limbah hasil budidaya belum dilaksanakan secara optimal.					
	Terjadi pencemaran air pada kawasan tambak					

https://jdih.pemalangkab.go.id

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Beberapa kawasan tambak hilang akibat abrasi dan rob					
	Ketersediaan sarana dan prasarana budidaya masih belum memadai					
	Harga pakan ikan tergolong tinggi dan membebani pembudidaya					
	Kapasitas sumber daya manusia di sektor perikanan masih rendah					
Pengolahan Hasil Perikanan: Potensi pengembangan produk olahan berbasis ikan lokal seperti pindang, abon, kerupuk, dan nugget ikan.	Inovasi produk perikanan olahan masih sangat terbatas					Masih Rendahnya kapasitas dan kemandirian sumber daya manusia
	Kualitas produk olahan perikanan masih belum memenuhi standar					
	Tingkat konsumsi ikan di masyarakat masih rendah					
	Proses pengolahan ikan masih belum higienis dan penggunaan bahan tambahan pangan belum sesuai ketentuan					
Pemasaran Hasil Perikanan: Dukungan pasar lokal dan potensi ekspansi ke pasar luar daerah melalui penguatan UMKM perikanan	Akses pasar bagi produk perikanan masih terbatas					Rendahnya nilai tambah dan daya saing produk perikanan
	Sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan masih minim					
	Permodalan untuk usaha pengolahan dan pemasaran masih belum memadai					
Sumber Daya Manusia Perikanan: Komunitas nelayan dan pembudidaya	Tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap perizinan pengolahan					Meningkatnya risiko perubahan iklim dan degradasi lingkungan

https://jdih.pemalangkab.go.id

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
ikan yang dapat ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan dan pendampingan	dan pemasaran masih rendah					terhadap sektor perikanan
	Tingkat kesadaran terhadap perizinan usaha perikanan dan kecakapan pelayaran masih rendah					

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi kepala daerah. Visi Bupati dan Wakil Bupati periode masa jabatan 2025-2030 adalah **"PEMALANG BERCAHAYA - BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA"**. Dalam rangka mencapai visi tersebut, misi RPJMD 2025-2029 berdasarkan misi Kepala Daerah Kabupaten Pemalang yang terpilih yaitu **RHAPSODI (Resik, Hijau, Apik, Peduli, Silaturahmi, Organisatoris, Digitalisasi dan Ikhlas)**, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Misi 1 Resik: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih.
   Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik
2. Misi 2 Hijau: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sector unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau, yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan) yang ramah lingkungan, industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM dimasyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.
3. Misi 3 Apik: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penaatan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dari Desa.
4. Misi 4 Peduli: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik dari pendidikan, kesehatan dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

SDM yang memiliki karakater, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi.

5. Misi 5 Silaturahmi: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong,tepa selira dan sejahtera.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, dan saling menghormati dan teposliro.
6. Misi 6 Organisatoris: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan Good Governance, Clean Governance dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.
7. Misi 7 Digitalisasi: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi.
8. Misi 8 Ikhlas: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkan kearifan dan budaya lokal.

Dari 8 (delapan) misi tersebut, misi yang berkaitan dengan Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang adalah **Misi ke-2 Hijau** yaitu meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang merumuskan tujuan yang selanjutnya dijabarkan dengan mewujudkan sasaran sebagai berikut:

Meningkatnya ketahanan pangan, kontribusi pertanian dan kontribusi perikanan dalam perekonomian

a. Meningkatnya keanekargaman dan pemenuhan kecukupan pangan
b. Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan
c. Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET					Strategi	Kebijakan	Program
							2025	2026	2027	2028	2029			
Meningkatnya daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal	Meningkatnya ketahanan pangan, kontribusi pertanian dan kontribusi perikanan dalam perekonomian		Indeks Ketahanan Pangan	1. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan z-score dan distance to scale (0-100) 2. Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator 3. Mengelompokkan wilayah ke dalam 6 kelompok berdasarkan cut off point IKP	%	81,81	81,49	82,00	82,99	83,98	84,96	- Penguatan cadangan dan distribusi pangan daerah, - Intervensi daerah rentan pangan, - Pengembangan keanekaragaman pangan dan keamanan pangan, - Peningkatan kualitas gizi masyarakat yang difokuskan pada pencapaian pola pangan harapan (PPH), konsumsi seimbang dan keanekaragaman pangan.	- Penyediaan data dan perencanaan ketersediaan pangan serta infrastruktur pendukungnya, - Mengaktifkan dan mengoptimalkan lumbung pangan masyarakat, - Peningkatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan beragam, bergizi, aman dan seimbang (B2SA), - Meningkatkan pengawasan pangan segar asal tumbuhan dan hewan	- Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan, - Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, - Penanganan Kerawanan Pangan, - Pengawasan Keamanan Pangan
		Meningkatnya keanekaragaman dan pemenuhan kecukupan pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (diversifikasi dan keamana)	Membandingkan antara konsumsi kalori per kapita dan MDER. Nilai PoU merupakan proporsi penduduk yang konsumsi kalorinya di	%	6,31	6,20	6,00	5,80	5,60	5,40			

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET					Strategi	Kebijakan	Program
							2025	2026	2027	2028	2029			
				bawah MDER terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan.										
			Skor PPH	% Angka Kecukupan Gizi (AKG) tingkat konsumsi dikalikan Bobot setiap kelompok pangan yg sudah ditetapkan (9 kelompok pangan : padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah-buahan, lainnya).	%	95,49	96,24	96,99	97,74	98,5	99,25			
	Meningkatnya ketahanan pangan, kontribusi pertanian dan kontribusi perikanan dalam perekonomian		Kontribusi pertanian dan perikanan dalam PDRB	Kontribusi Pertanian, perikanan dan kehutanan dalam PDRB ADHB tahun n	%	25,82	25,05	25,05	25,05	25,05	25,05	- Penguatan kemandirian pangan dan hilirisasi produk pertanian dengan moderinisasi pertanian; - Identifikasi ketersediaan dan pengelolaan alat dan mesin pertanian (alsintan) baik oleh Dinas Pertanian maupun kelompok tani; - Pemanfaatan	- Penyediaan sarana pertanian (Penyediaan benih/bibit unggul, penyediaan pupuk murah pada 10 komoditas (padi, jagung, kedele, cabe, bawang merah, bawang putih, tebu, kakao, ketela pohon, kopi), penyediaan alat mesin pertanian); - Pembentukan UPJA dan Brigade Alsintan;	- Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, - Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, - Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, - Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian,
		Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	Produktivitas tanaman pangan (padi)	Jumlah Produksi per Hektar per tahun / Luas Panen	Kw/Ha	62,09	62,15	62,21	62,28	62,34	62,40			
			Produktivitas hortikultura (nanas)	Jumlah Produksi per Hektar per tahun / Luas Panen	Kw/Ha	1.320,21	741,42	741,50	741,57	741,65	741,72			

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET					Strategi	Kebijakan	Program
							2025	2026	2027	2028	2029			
			Produktivitas perkebunan (kopi)	Jumlah Produksi per Hektar per tahun / Luas Panen	Kw/ Ha	13,31	15,00	17,00	19,00	20,00	21,00	tekhnologi pertanian modern; - Mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan; - Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur pertanian; - Peningkatan Kesehatan Hewan, - Penguatan penanganan bencana pertanian dan peningkatan pencegahan, pengendalian, dan pemantauan organisme penganggu tanaman (OPT); - Peningkatan petani milineal dalam mendorong swasembada pangan dan kemandirian pangan.	- Fasilitasi proses produksi dan pemasaran produk pertanian; - Penerapan Perda Nomer 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); - Pemberdayaan petani dan pemberian bantuan pada petani yang mempunyai lahan di LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) berupa kemudahan akses pupuk, pemberian bibit tersertifikasi dan sarana pertanian lainnya; - Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Pertanian; - Peningkatan ketersediaan air dengan memberikan kualitas irigasi, penyediaan sumur dalam untuk penyediaan air. - Pencegahan penyakit dengan vaksinasi dan KIE (komunikasi informasi edukasi), - Penerapan pelayanan terpadu kesehatan hewan baik aktif maupun pasif untuk penanggulangan	- Penyuluhan Pertanian
			Produksi ternak besar (daging sapi, daging kambing); produksi ternak unggas; produksi telur ayam ras	Jumlah produksi ternak besar (daging sapi, daging kambing); produksi ternak unggas; produksi telur ayam ras	Kg	4.667.748	4.671.940	4.675.855	4.679.425	4.683.965	4.687.099			

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET					Strategi	Kebijakan	Program
							2025	2026	2027	2028	2029			
													pemberantasan, dan pengobatan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ), - Pengamanan pertanaman dan produksi dari gangguan OPT serta bencana alam, banjir dan kekeringan melalui gerakan pengendalian dengan melibatkan petani dan petugas OPT, - Penanganan dampak rob dengan pemberian bantuan padi padi varietas Biosalin yang toleran terhadap salinitas, guna memastikan tetap terjaganya produktivitas lahan pertanian di wilayah pesisir - Peningkatan kelembagaan pertanian dan SDM pertanian.	
			Total Produksi Perikanan	Total Produksi Perikanan Terdiri Dari Produksi Perikanan Tangkap, Produksi Perikanan Budidaya dan Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton/Tahun	50.163	50.191	50.757	51.337	51.929	52.537	- Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaku Usaha Perikanan - Peningkatan Akses Sarana dan Prasarana Produksi - Perbaikan Mutu dan Penanganan Pascapanen	- Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) agar lebih tertib, higienis, dan transparan, sehingga harga jual lebih adil dan produk lebih berkualitas, - Peningkatan fasilitas TPI, seperti ruang lelang, cold storage, dan sistem penanganan ikan segar,	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET					Strategi	Kebijakan	Program
							2025	2026	2027	2028	2029			
												- Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Inovasi Digital - Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Lokal - Penerapan Prinsip Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan	- Penguatan pemasaran hasil perikanan, baik melalui promosi, kemitraan usaha, maupun pembukaan akses pasar digital dan modern, guna meningkatkan nilai ekonomi produk perikanan lokal, - Pelatihan teknis dan kewirausahaan untuk nelayan, pembudidaya, dan pelaku pengolahan agar lebih produktif dan adaptif terhadap teknologi, - Penguatan kelembagaan kelompok perikanan, termasuk legalitas, tata kelola organisasi, dan akses pembiayaan, - Optimalisasi sumber daya perikanan, seperti peningkatan efisiensi budidaya, pengelolaan wilayah tangkap berkelanjutan, dan pemanfaatan teknologi tepat guna, - Tujuan akhirnya adalah menjadikan pelaku usaha lebih mandiri, kompetitif, dan berkelanjutan dalam memanfaatkan potensi	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET					Strategi	Kebijakan	Program
							2025	2026	2027	2028	2029			
													perikanan yang dimiliki daerah.	
		Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Nilai rata-rata per unsur pelayanan (nilai hasil survei per unsur) dibagi Jumlah unsur pelayanan dikali 25	Indeks	84,8	85,0	85,3	85,5	85,8	86,0	- Penguatan Sistem Perencanaan dan Evaluasi Berbasis Kinerja, - Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Tata Kelola Program dan Layanan, - Digitalisasi Sistem Informasi untuk Transparansi dan Akuntabilitas, - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, - Penguatan Pengawasan Internal dan Penegakan Integritas Organisasi, - Monitoring dan Evaluasi Berbasis Kepuasan Masyarakat	- Pengembangan Layanan yang Mudah, Cepat, dan Murah, - Pemenuhan Standar Pelayanan Publik, - Inovasi Pelayanan Publik, - Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana kerja, seperti perangkat teknologi informasi, jaringan internet, dan sistem pelaporan digital agar proses pelaporan berjalan efisien dan akurat, - Peningkatan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan peningkatan kompetensi aparatur dalam menyusun laporan yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai standar, - Mendorong akuntabilitas dan transparansi melalui pelaporan yang berbasis data dan kinerja.	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Nilai SAKIP		Indeks	66	68	69	70	71	72			

https://jdih.pemalangkab.go.id

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah cara dan teknik mencapai tujuan dan sasaran, yang akan dijadikan acuan dalam penetapan kebijakan, program pembangunan, program kerja dan kegiatan. Strategi sekaligus merupakan asumsi dasar untuk tercapainya tujuan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang.

Strategi yang ditempuh oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Jaminan Ketersediaan Bibit unggul dan Pupuk Murah. Pencapaian program prioritas ini diarahkan pada penyediaan ketersediaan bibit unggul dan pupuk murah. Sebagai upaya mendukung program prioritas Bupati dalam menjamin ketersediaan bibit unggul bagi para petani, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan akan melaksanakan kegiatan penangkaran benih secara terencana dan berkelanjutan Langkah awal yang akan dilakukan adalah pembuatan demplot padi super genjah varietas M70D, sebagai sarana uji adaptasi, potensi hasil, serta media edukasi dan percontohan bagi petani. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan benih unggul yang memiliki daya tumbuh tinggi, umur panen pendek, tahan terhadap hama dan penyakit, serta sesuai dengan kondisi agroklimat setempat, sehingga dapat ditanam lebih luas di berbagai wilayah dan mendukung peningkatan produktivitas pertanian daerah. Pada tahun berikutnya, direncanakan pengembangan Desa Mandiri Benih Padi, agar Kabupaten Pemalang mampu memproduksi benih padi berkualitas secara mandiri dan terjangkau. Benih tersebut akan diperoleh dari pemanfaatan benih F1 yang disediakan oleh Kementerian Pertanian, kemudian dikembangkan lebih lanjut di Kabupaten Pemalang. Selain komoditas padi, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan juga merencanakan pengembangan komoditas hortikultura berbasis varietas lokal, guna memperkuat diversifikasi dan ketahanan pangan daerah. Dalam rangka menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bagi petani, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan strategis untuk memasukkan seluruh petani pemilik lahan sawah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam basis data e-RDKK. Langkah ini merupakan prasyarat utama agar alokasi pupuk bersubsidi—baik organik maupun anorganik—dapat disalurkan secara tepat sasaran, merata, dan transparan kepada seluruh petani yang berhak. Melalui pendataan e-RDKK yang mutakhir dan terintegrasi,

https://jdih.pemalangkab.go.id

setiap petani LP2B akan memperoleh kepastian harga pupuk yang terjangkau sesuai ketentuan subsidi nasional. Selain meningkatkan efisiensi biaya produksi, kebijakan ini juga memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha tani padi di wilayah kita. Sebaliknya, petani yang belum terdaftar dalam e-RDKK hanya dapat mengakses pupuk nonsubsidi dengan harga sekitar tiga kali lipat lebih tinggi, sehingga pendataan yang lengkap dan akurat menjadi kebutuhan mendesak.

2. Meningkatnya ketersediaan dan keanekaragaman pangan. Sasaran ini diarahkan pada penguatan cadangan dan distribusi pangan daerah, intervensi daerah rentan pangan, pengembangan keanekaragaman pangan dan keamanan pangan, peningkatan kualitas gizi masyarakat yang difokuskan pada pencapaian pola pangan harapan (PPH), konsumsi seimbang dan keanekaragaman pangan. Untuk penyediaan cadangan pangan perlu adanya kerjasama dengan stakeholder yang terkait (Dispermasdes dan Pemerintah Desa). Dalam upaya penguatan dan distribusi pangan, Koperasi Desa Merah Putih mempunyai peran sebagai mitra strategis di tingkat desa. Koperasi ini membantu menyediakan dan mengelola cadangan pangan skala desa melalui mekanisme pembelian hasil pertanian lokal dan penyimpanan dalam lumbung pangan desa. Selain itu, koperasi juga berperan dalam memperlancar distribusi pangan pokok dan produk pangan lokal langsung kepada masyarakat, dengan harga yang lebih terjangkau dan stabil. Melalui fungsi distribusinya, koperasi turut memotong rantai pasok yang panjang, sehingga menekan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi penyediaan pangan. Koperasi juga mendukung ketersediaan pangan di wilayah rentan dengan menjangkau desa-desa terpencil dan menyuplai kebutuhan pangan saat terjadi gangguan pasokan, seperti pada musim paceklik atau kondisi darurat.
3. Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan. Sasaran ini diarahkan pada penguatan kemandirian pangan dan hilirisasi produk pertanian dan perikanan dengan moderinisasi pertanian dan perikanan. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan alat dan mesin pertanian dan perikanan baik oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan maupun kelompok tani. Pengelolaan alsintan di Dinas Pertanian dilaksanakan oleh Brigade Alsintan sedangkan ditingkat kelompok tani dilaksanakan oleh UPJA (Unit Pelayanan Jasa Alsintan). Pemanfaatan tekhnologi pertanian modern mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan dengan salah satu kebijakannya

https://jdih.pemalangkab.go.id

meningkatnya pemberdayaan petani dan pemberian bantuan pada petani yang mempunyai lahan di LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) berupa kemudahan akses pupuk, pemberian bibit tersertifikasi dan sarana pertanian lainnya. Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur pertanian. Penguatan penanganan bencana pertanian dan peningkatan pencegahan, pengendalian, dan pemantauan organisme penganggu tanaman (OPT) melalui gerakan pengendalian dengan melibatkan petani dan petugas OPT. Peningkatan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner dengan pencegahan berupa vaksinasi dan KIE (komunikasi informasi edukasi), penanggulangan pemberantasan, dan pengobatan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ) melalui pelayanan terpadu kesehatan hewan baik aktif maupun pasif. Peningkatan petani milineal dalam mendorong swasembada pangan dan kemandirian pangan. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) agar lebih tertib, higienis, dan transparan, sehingga harga jual lebih adil dan produk lebih berkualitas. Peningkatan fasilitas TPI, seperti ruang lelang, cold storage, dan sistem penanganan ikan segar. Penguatan pemasaran hasil perikanan, baik melalui promosi, kemitraan usaha, maupun pembukaan akses pasar digital dan modern, guna meningkatkan nilai ekonomi produk perikanan lokal. Pelatihan teknis dan kewirausahaan untuk nelayan, pembudidaya, dan pelaku pengolahan agar lebih produktif dan adaptif terhadap teknologi. Penguatan kelembagaan kelompok perikanan, termasuk legalitas, tata kelola organisasi, dan akses pembiayaan. Optimalisasi sumber daya perikanan, seperti peningkatan efisiensi budidaya, pengelolaan wilayah tangkap berkelanjutan, dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Tujuan akhirnya adalah menjadikan pelaku usaha lebih mandiri, kompetitif, dan berkelanjutan dalam memanfaatkan potensi perikanan yang dimiliki daerah.

Dari strategi di atas selanjutnya dilakukan penahapan renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029. Penahapan pembangunan ini sangat penting karena memungkinkan pengelolaan sumber daya dan waktu secara efisien, mendorong koordinasi antar sektor dan memastikan pencapaian tujuan pembangunan secara berkelanjutan. Penahapan renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 dapat dijadikan seperti tabel di bawah ini :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.2

Penahapan Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

Kabupaten Pemalang

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemenuhan Dan Penguatan Sarana Dan Prasarana Pertanian, Pangan Dan Perikanan	**Meningkatkan Produksi Pertanian, Perikanan Dan Keanekaragaman Pangan Melalui Pengembangan Usaha Berbasis Kawasan**	**Meningkatkan Keterjangkauan Pangan, Transformasi Digital Dan Peningkatan Hilirisasi Produk Pertanian Dan Perikanan**	**Mewujudkan Daya Saing Pertanian, Pangan Dan Perikanan**	**Terwujudnya Kemandirian, Ketahanan Dan Swasembada Pangan Untuk Mendukung Perekonomian Daerah**
1. Pengembangan infrastruktur pertanian, pangan dan perikanan 2. Penyediaan dan modernisasi alat-mesin pertanian, pangan dan perikanan 3. Penyediaan sarana (bibit, benih unggul, pupuk, obat, pestisida, pakan dan lainnya) 4. Penguatan sistem distribusi dan logistik pangan	1. Pengembangan kawasan usaha pertanian dan perikanan 2. Penguatan sistem budidaya berkelanjutan 3. Pemanfaatan teknologi modern 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan bibit unggul 5. Pemberdayaan kelembagaan pelaku usaha pertanian, pangan dan perikanan 6. Pengembangan komoditas alternatif pangan	1. Penguatan sistem distribusi pangan dan sistem rantai dingin produk 2. Pengendalian harga pangan melalui 3. Penguatan kemitraan pelaku usaha pertanian dan perikanan 4. Pemanfaatan tekhnologi dan inovasi dalam proses produksi dan pemasaran	1. Penguatan proses produksi dan mutu produk pertanian dan perikanan 2. Penataan kelembagaan pertanian, pangan dan perikanan 3. Penguatan sumber daya pertanian dan perikanan	1. Terwujudnya sasaran dan prasarana pertanian, pangan dan perikanan 2. Peningkatan produksi pertanian, pangan dan perikanan 3. Meningkatnya nilai produk hilirisasi pertanian dan perikanan 4. Meningkatnya daya saing sumber daya dan produk pertanian-perikanan 5. Meningkatnya keterjangkauan pangan

Tahap I (Tahun 2026) **Pemenuhan dan Penguatan Sarana-Prasarana Pertanian, Pangan dan Perikanan**. Prioritas pembangunan pada Tahap I adalah Pemenuhan sarana dan prasarana pertanian pangan serta perikanan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan produksi dan memastikan keterjangkauan akses pangan secara berkelanjutan. Sarana dan prasarana yang memadai menjadi fondasi utama dalam membangun sistem pertanian dan perikanan yang efisien, produktif, serta tangguh dalam menghadapi perubahan iklim dan dinamika pasar. Upaya pemenuhan sarana prasarana pertanian dan perikanan dilakukan melalui : Pengembangan infrastruktur pertanian dan perikanan, termasuk irigasi, jalan usaha tani, irigasi tambak perikanan,

https://jdih.pemalangkab.go.id

jalan produksi perikanan, jembatan produksi perikanan, Tempat Pelelangan Hasil Tambak (TPHT), Tempat Pelelangan Ikan (TPI), kolam ikan, Unit Pengolahan Ikan; modernisasi alat dan mesin pertanian dan perikanan guna mendukung efisiensi proses budidaya dan panen; Penyediaan benih/ bibit unggul dan pupuk dengan harga terjangkau untuk meningkatkan hasil produksi dan kesuburan lahan; Penyediaan obat hewan dan peralatan kesehatan hewan dalam rangka menjaga kesehatan ternak dan meningkatkan produktivitas peternakan; Penyediaan pestisida, obat dan sarana penanggulangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) untuk melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit; Penyediaan alat tangkap ramah lingkungan (jala, pancing, bubu); Penyediaan sarana penangkapan ikan (cool box, Global Positioning System, fish finder, lampu apolo); Penyediaan peralatan pengolahan hasil perikanan; Penguatan sistem distribusi dan logistik pangan, agar hasil produksi dapat tersalurkan secara merata dan efisien ke seluruh wilayah. Dalam mendukung prioritas pembangunan ini, Koperasi Desa Merah Putih memiliki peran penting sebagai lembaga ekonomi desa yang mampu menjembatani kebutuhan petani dan nelayan terhadap sarana produksi dan distribusi hasil pertanian dan perikanan. Koperasi dapat berfungsi sebagai penyedia dan pengelola alat dan mesin pertanian dan perikanan secara kolektif bagi anggotanya, sehingga mendukung efisiensi usaha tani dan nelayan serta modernisasi produksi. Di samping itu, koperasi juga dapat menjadi mitra pemerintah desa dalam menyalurkan pupuk, benih, dan input pertanian lainnya secara tepat sasaran. Dalam aspek distribusi dan logistik pangan, koperasi berperan sebagai simpul penghubung antara petani dan pasar melalui kegiatan pengumpulan, penyimpanan, serta pemasaran hasil pertanian dan perikanan. Dengan memperpendek rantai distribusi, koperasi membantu menjaga stabilitas harga, meningkatkan nilai tambah produk petani dan nelayan, dan memperluas akses pangan bagi masyarakat, terutama di wilayah rentan. Dengan dukungan terhadap pengembangan koperasi desa, pembangunan sarana prasarana pertanian dan perikanan tidak hanya akan bersifat fisik semata, tetapi juga memperkuat kelembagaan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Tahap II (Tahun 2027) **Meningkatkan Produksi Pertanian, Perikanan Dan Keanekaragaman Pangan Melalui Pengembangan Usaha Berbasis Kawasan**. Prioritas pembangunan pada Tahap II adalah meningkatkan produksi pertanian dan keanekaragaman pangan untuk

https://jdih.pemalangkab.go.id

memperkuat ketahanan pangan daerah serta mendukung ketersediaan bahan baku industri berbasis pertanian. Upaya ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, mengurangi ketergantungan impor, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Untuk mewujudkan hal tersebut, berbagai strategi akan dilakukan, antara lain pengembangan kawasan usaha pertanian dan perikanan, penguatan sistem budidaya berkelanjutan, pemanfaatan teknologi modern, peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan bibit unggul, serta pemberdayaan kelembagaan pelaku usaha pertanian dan perikanan. Selain itu, diversifikasi pangan lokal akan didorong melalui pengembangan komoditas alternatif pangan seperti umbi-umbian, hortikultura, dan pangan fungsional yang sesuai dengan kondisi agroklimat setempat.

Tahap III (Tahun 2028) **Meningkatkan Keterjangkauan Pangan, Transformasi Digital Dan Peningkatan Hilirisasi Produk Pertanian-Perikanan.** Prioritas pembangunan pada tahap III difokuskan pada peningkatan keterjangkauan pangan dan penguatan hilirisasi produk pertanian. Prioritas utama adalah memastikan seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan berpenghasilan rendah, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau secara ekonomi. Keterjangkauan pangan merupakan aspek krusial dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Upaya peningkatan keterjangkauan pangan dilakukan melalui penguatan sistem distribusi pangan dan sistem rantai dingin produk perikanan; pengendalian harga pangan melalui informasi harga pangan, subsidi harga/ operasi pasar/ gerakan pangan murah, serta peningkatan kapasitas produksi domestik yang efisien dan merata di seluruh wilayah. Langkah ini juga didukung dengan pembangunan infrastruktur pendukung, seperti jaringan irigasi, jalan usaha tani, dan pasar induk yang terintegrasi. Selain itu, prioritas pembangunan lainnya adalah mendorong hilirisasi produk pertanian dan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas lokal. Hilirisasi diarahkan pada pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Upaya peningkatan hilirisasi produk pertanian dan perikanan dilakukan melalui penguatan kemitraan pelaku usaha pertanian dan perikanan, pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam proses produksi dan pemasaran. Dengan demikian, hilirisasi tidak hanya meningkatkan pendapatan petani dan nelayan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan memperkuat struktur ekonomi pedesaan. Tahap ini juga menekankan

https://jdih.pemalangkab.go.id

pentingnya kolaborasi lintas sektor, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung sistem pangan nasional yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan iklim dan dinamika global.

Tahap IV (Tahun 2029) **Mewujudkan Daya Saing Pertanian Pangan Dan Perikanan.** Prioritas pembangunan pada tahap IV difokuskan pada terwujudnya daya saing sektor pertanian pangan dan perikanan yang lebih kuat, baik dari sisi produksi, kelembagaan, maupun sumber daya pendukungnya. Upaya pertama yang perlu dilakukan adalah penguatan proses produksi dan mutu produk pertanian serta perikanan. Fokus utama diarahkan pada peningkatan produktivitas dan efisiensi dengan pemanfaatan benih dan indukan unggul, penerapan teknologi budidaya modern, serta mekanisasi yang sesuai kebutuhan lapangan. Praktik budidaya berkelanjutan seperti pemupukan berimbang berbasis uji tanah, pengendalian organisme pengganggu terpadu, serta budidaya perikanan dengan sistem bioflok atau tambak modular didorong untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Selanjutnya, jaminan mutu diperkuat melalui penerapan sertifikasi keamanan pangan, pengujian residu dan kualitas produk secara berkala, serta pembangunan sistem rantai dingin yang terintegrasi dari penyimpanan, transportasi, hingga distribusi. Dengan langkah ini, tingkat kehilangan hasil pascapanen dapat ditekan, daya simpan produk meningkat, dan daya saing produk pertanian serta perikanan Pemalang semakin kokoh di pasar domestik maupun internasional. Aspek berikutnya adalah penataan kelembagaan pertanian, pangan, dan perikanan dilakukan untuk memperkuat posisi tawar petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil dalam rantai pasok. Kelompok tani dan nelayan diarahkan menjadi kelembagaan ekonomi yang lebih solid, seperti koperasi modern, BUMDes pengelola usaha tani, maupun korporasi petani yang mampu mengelola usaha secara kolektif dan profesional. Penataan kelembagaan ini juga didukung dengan penguatan peran BUMD pangan dan perikanan sebagai agregator serta pengelola logistik, pasar lelang, dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) modern yang higienis dan transparan. Selain itu, pola kemitraan dengan pelaku industri, offtaker, maupun eksportir melalui skema contract farming didorong untuk menjamin kepastian harga, pasar, dan keberlanjutan usaha. Dengan kelembagaan yang lebih kuat, petani dan nelayan di Pemalang akan memiliki akses lebih baik terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar, sehingga mampu bertransformasi menjadi pelaku agribisnis yang berdaya saing.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Selanjutnya, penguatan sumber daya pertanian dan perikanan menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan daya saing. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan, sekolah lapang, magang industri, serta pendampingan teknologi digital agar petani dan nelayan mampu mengelola usaha secara modern. Dari sisi infrastruktur, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, embung, jalan usaha tani, dermaga, cold storage, dan fasilitas pengolahan menjadi prioritas untuk memperlancar produksi dan distribusi. Melalui penguatan produksi dan mutu, penataan kelembagaan, serta penguatan sumber daya secara terpadu, Kabupaten Pemalang diharapkan mampu menghadirkan sektor pertanian pangan dan perikanan yang tangguh, berdaya saing tinggi, serta memberikan nilai tambah nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah pada tahun 2029.

Tahap V (Tahun 2030) **Terwujudnya kemandirian, ketahanan dan swasembada pangan untuk mendukung perekonomian daerah.** Pada Tahap V pembangunan, Kabupaten Pemalang diarahkan untuk mencapai kemandirian, ketahanan dan swasembada pangan sebagai prioritas utama dalam mewujudkan sistem pertanian dan perikanan yang tangguh, berkelanjutan, dan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara mandiri. Tahap ini merupakan puncak dari rangkaian pembangunan pertanian yang telah dilakukan dalam fase-fase sebelumnya, yang mencakup pemenuhan sarana prasaran pertanian, pangan dan perikanan; peningkatan produksi pertanian, pangan dan perikanan; meningkatnya nilai produk hilirisasi pertanian dan perikanan; meningkatnya daya saing sumber daya dan produk pertanian-perikanan; meningkatnya keterjangkauan pangan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.3

Arah Kebijakan Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

No	Arah Kebijakan Rpjmd	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	Peningkatan cadangan pangan masyarakat dengan peningkatan lumbung pangan, distribusi pangan, pemanfaatan lahan dan keamanan pangan	1. Penyediaan data dan perencanaan ketersediaan pangan serta infrastruktur pendukungnya; 2. Mengaktifkan dan mengoptimalkan lumbung pangan masyarakat; 3. Peningkatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan beragam, bergizi, aman dan seimbang (B2SA); 4. Meningkatkan pengawasan pangan segar asal tumbuhan dan hewan.	
2	Peningkatan kualitas produksi pertanian yang dititik beratkan pada peningkatan produktivitas hasil pertanian secara berkelanjutan, modernisasi dan hilirisasi pertanian dan pengembangan agro industri serta peningkatan kualitas petani milenial	1. Penyediaan sarana pertanian (Penyediaan benih/bibit unggul, penyediaan pupuk murah pada 10 komoditas (padi, jagung, kedele, cabe, bawang merah, bawang putih, tebu, kakao, ketela pohon, kopi), penyediaan alat mesin pertanian); 2. Pembentukan UPJA dan Brigade Alsintan; 3. Fasilitasi proses produksi dan pemasaran produk pertanian; 4. Penerapan Perda Nomer 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); 5. Pemberdayaan petani dan pemberian bantuan pada petani yang mempunyai lahan di LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) berupa kemudahan akses pupuk, pemberian bibit tersertifikasi dan sarana pertanian lainnya; 6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Pertanian; 7. Peningkatan ketersediaan air dengan memberikan kualitas irigasi, penyediaan sumur dalam untuk penyediaan air; 8. Pencegahan penyakit dengan vaksinasi dan KIE (komunikasi informasi edukasi); 9. Pelayanan terpadu kesehatan hewan baik aktif maupun pasif untuk penanggulangan pemberantasan, dan pengobatan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ); 10. Pengamanan pertanaman dan produksi dari gangguan OPT serta bencana alam, banjir dan kekeringan melalui gerakan pengendalian OPT; 11. Penanganan dampak rob dengan pemberian bantuan padi varietas Biosalin yang toleran terhadap salinitas, guna memastikan tetap terjaganya produktivitas lahan pertanian di wilayah pesisir; 12. Peningkatan kelembagaan pertanian dan SDM pertanian; 13. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) agar lebih tertib, higienis, dan transparan, sehingga harga jual lebih adil dan produk lebih berkualitas; 14. Peningkatan fasilitas TPI, seperti ruang lelang, cold storage, dan sistem penanganan ikan segar; 15. Penguatan pemasaran hasil perikanan, baik melalui promosi, kemitraan usaha, maupun pembukaan akses pasar digital dan modern, guna meningkatkan nilai ekonomi produk perikanan; 16. Pelatihan teknis dan kewirausahaan untuk nelayan, pembudidaya, dan pelaku pengolahan agar lebih produktif dan adaptif terhadap teknologi; 17. Penguatan kelembagaan kelompok perikanan, termasuk legalitas, tata kelola organisasi, dan akses pembiayaan; 18. Optimalisasi sumber daya perikanan, seperti peningkatan efisiensi budidaya, pengelolaan wilayah tangkap berkelanjutan, dan pemanfaatan teknologi tepat guna; 19. Tujuan akhirnya adalah menjadikan pelaku usaha lebih mandiri, kompetitif, dan berkelanjutan dalam memanfaatkan potensi perikanan yang dimiliki daerah.	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pemalang yang terdiri dari dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program pembangunan dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 ini disusun berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah.

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang mengampu tiga urusan, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pangan dan Urusan Pilihan Bidang Pertanian dan Bidang Perikanan yang mendukung tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

1. **Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.** Program ini mencakup kegiatan penyediaan dan pengawasan infrastruktur pendukung kemandirian pangan. Tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan ketersediaan cadangan pangan secara berkelanjutan, baik di tingkat masyarakat maupun pemerintah daerah, sebagai langkah antisipatif terhadap potensi kerawanan pangan, fluktuasi harga, maupun gangguan distribusi akibat bencana atau kondisi darurat lainnya.
2. **Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat.** Program ini mencakup beberapa kegiatan antara lain : Fasilitasi pemasaran dan peningkatan kapasitas pelaku usaha pertanian, penguatan kelembagaan desa mandiri pangan, penyediaan informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen, pemantauan harga dan pasokan pangan, pengelolaan dan penyediaan cadangan pangan, penyusunan dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

penetapan target konsumsi pangan, pemberdayaan masyarakat dalam pengeanekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Tujuan utama dari program ini adalah Meningkatkan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

3. **Program Penanganan Kerawanan Pangan.** Program ini mencakup beberapa kegiatan antara lain : penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan. Tujuan utama dari program ini adalah Meningkatkan Penanganan Kerawanan Pangan.
4. **Program Pengawasan Keamanan Pangan.** Program ini mencakup kegiatan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan. Tujuan utama dari program ini adalah Meningkatkan Pengawasan Keamanan Pangan.
5. **Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian.** Program ini mencakup beberapa kegiatan antara lain : Pengawasan penggunaan sarana, penyediaan alat mesin pertanian, penyediaan benih/ bibit pertanian, peternakan dan perkebunan dab penyediaan sarana lainnya. Tujuan utama dari program ini adalah Meningkatkan produksi pertanian yang didukung oleh sarana pertanian.
6. **Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian.** Program ini mencakup kegiatan pengembangan dan pembangunan prasarana pertanian seperti pembangun, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani, Jaringan Irigasi Usaha Tani, Dam Parit dan prasarana lainnya. Tujuan utama dari program ini adalah Meningkatkan kualitas prasarana pertanian.
7. **Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.** Program ini mencakup beberapa kegiatan antara lain : Penjaminan kesehatan hewan, pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan, pengelolaan layanan Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) dan Rumah Potong Hewan (RPH), pemantauan data informasi harga pasar komoditas peternakan, fasilitasi pemasaran untuk pelaku usaha hasil peternakan, pengawasan ante mortem dan post mortem hewan kurban dan pembinaan konsumen bahan pangan asal hewan. Tujuan utama dari program ini adalah Meningkatkan kesehatan hewan dan terpenuhinya jaminan keamanan produk hewan bagi masyarakat.
8. **Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian.** Program ini mencakup kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian seperti pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan penangan lahan terdampak perubahan iklim. Tujuan

https://jdih.pemalangkab.go.id

utama dari program ini adalah Terwujudnya sistem pertanian yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim guna menjamin keberlanjutan produksi pertanian dan perlindungan terhadap petani.

9. **Program Penyuluhan Pertanian.** Program ini mencakup kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian berupa peningkatan kapasitas penyuluh pertanian dan kelembagaan petani. Tujuan utama dari program ini adalah Meningkatkan kapasitas penyuluh dan petani.
10. **Program pengelolaan perikanan tangkap.** Fokus pembangunan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang diarahkan pada peningkatan sarana prasarana tangkap, penguatan data sumber daya ikan, pemberdayaan nelayan kecil melalui pelatihan, kelembagaan, dan akses pembiayaan, optimalisasi pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta peningkatan layanan administrasi dan legalitas kapal perikanan kecil untuk mendukung usaha tangkap yang produktif, berkelanjutan, dan berdaya saing.
11. **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.** Fokus pembangunan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang diarahkan pada pemberdayaan pembudidaya ikan kecil melalui penguatan kapasitas, kelembagaan, akses pembiayaan, pendampingan teknologi, dan pelatihan; peningkatan legalitas usaha melalui penerbitan TDPIK; serta pengelolaan budidaya yang berkelanjutan melalui penyediaan data, sarana prasarana, pengelolaan dan monitoring kesehatan ikan serta lingkungan, perlindungan lahan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk mendukung produktivitas, ketahanan usaha, dan keberlanjutan sumber daya perikanan budidaya.
12. **Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan.** Fokus pembangunan Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang diarahkan pada penguatan pengawasan terhadap seluruh aktivitas perikanan, meliputi usaha penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan di wilayah perairan darat sesuai kewenangan daerah, guna menjamin kepatuhan terhadap regulasi, menjaga kelestarian sumber daya perikanan, serta mencegah praktik-praktik ilegal yang merugikan ekosistem dan pelaku usaha perikanan.
13. **Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.** Fokus pembangunan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang diarahkan pada peningkatan daya saing produk perikanan skala mikro dan kecil melalui fasilitasi perizinan,

https://jdih.pemalangkab.go.id

pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan, penyediaan bahan baku, penguatan kapasitas teknis, penyediaan sarana prasarana usaha, serta dukungan akses pasar dan promosi konsumsi ikan. Selain itu, pembangunan juga difokuskan pada penguatan sistem jaminan mutu melalui pengujian produk, penerbitan sertifikasi GMP, dan revitalisasi unit serta sentra pengolahan guna mendorong tumbuhnya industri olahan perikanan yang higienis, berdaya saing, dan berkelanjutan.

14. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.** Program ini mencakup kegiatan penunjang seperti penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, keuangan, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, barang milik daerah dan lainnya. Tujuan utama dari program ini adalah Terwujudnya administratif dan teknis yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal	Meningkatny Ketahanan pangan, kontribusi pertanian dan kontribusi perikanan dalam perekonomian daerah				Indeks Ketahanan Pangan		
		Meningkatnya keanekargaman dan pemenuhan kecukupan pangan			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)		
					Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		
			Meningkatnya ketersediaan cadangan pangan		**Persentase Cadangan Pangan**	**Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**	
				Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	**Persentase Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan**	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	
				Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	
				Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat		**Konsumsi energi per kapita per hari**	**Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	
					Konsumsi protein perkapita per hari		
				Tersedia dan Tersalurkannya Pangan Pokok atau Pangan Lainnya	**Persentase Pangan Pokok atau Pangan Lainnya yang tersalurkan**	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	
				Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
				Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
				Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	
				Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya prognosa neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya informasi harga dan pasokan pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	
				Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Penyusunan Neraca Bahan Makanan(NBM)	
				Terkelolaannya dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	**Persentase Cadangan Pangan yang terkelola**	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	
				Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	
				Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	
				Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	
				Tersusunya Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	**Persentase Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang tersusun**	**Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi**	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	
				Terlaksananya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**Persentase Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi yang tercapai**	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	
				Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	
				Terkalolanya dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	**Persentase Cadangan Pangan yang terkelola**	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	
				Tersedianya kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota melalui Peraturan Kabuapaten/Kota	Jumlah Dokumen kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota melalui Peraturan Kabuapaten/Kota Yang Disusun	Penyusuna kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota melalui Peraturan Kabuapaten/Kota	
			Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan		**Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan**	**Program Penanganan Kerawanan Pangan**	
				Tersusunnya Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan	**Persentase Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang tersusun**	**Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	
				Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	
				Tertanganinya Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	
				Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/ Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/ Kota	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan		**Persentase produk pangan segar yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan**	**Program Pengawasan Keamanan Pangan**	
				Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Keamanan Pangan Segar Daerah yang terawasi**	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	
				Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
				Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	
				Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
				terbinanya Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Kecil dan Mikro	**Persentase Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Kecil dan Mikro yang terbina**	**Pembinaan Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Kecil dan Mikro**	
				Terlaksananya Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro Yang Dilaksanakan	Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro	
Meningkatnya daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal	Meningkatny Ketahanan pangan, kontribusi pertanian dan kontribusi perikanan dalam perekonomian daerah				Kontribusi pertanian dan perikanan dalam PDRB		
		Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan			Produktivitas tanaman pangan (padi)		
					Produktivitas hortikultura (nanas)		
					Produktivitas perkebunan (kopi)		
					Produksi ternak besar (daging sapi, daging kambing); produksi ternak unggas; produksi telur ayam ras		
					Total produksi perikanan (tangkap, budidaya, olahan hasil)		
			Meningkatnya produksi pertanian yang didukung oleh		**Produksi Tanaman Pangan**	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**	
					Produksi Tanaman Hortikultura		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			sarana pertanian		**Produksi Komoditas Perkebunan** **Populasi ternak**		
				Terawasinya Penggunaan Sarana Pertanian	**Persentase Penggunaan Sarana Pertanian yang terawasi**	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	
				Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
				Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
				Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
				Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	
				Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
				Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	
				Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	
				Terawasinya penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terawasinya penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	
				Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	
				Terkelolaannya Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme yang terkelola**	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	
				Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
				Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	
				Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	
				Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	
				Meningkatnya Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak yang meningkat**	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	
				Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	
				Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terawasinya Obat Hewan di Tingkat Pengecer	**Persentase Obat Hewan di Tingkat Pengecer yang terawasi**	**Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer**	
				Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	
				Terkendalinya dan Terawasinya Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak yang terawasi**	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	
				Terawasinya Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	
				Terawasinya peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	
				Tersediaannya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	**Persentase benih/bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak yang tersedia**	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	
				Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
				Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			Meningkatnya kualitas prasarana pertanian		**Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik (irigasi, JUT)**	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	
				Berkembangnya prasarana pertanian	**Persentase prasarana pertanian yang berkembang**	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
				Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
				Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	
				Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	
				Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	
				Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	
				Terwujudkan peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	
				Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
				Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
				Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjuta	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	
				Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/ Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	
				Terbangunnya Prasarana Pertanian	**Persentase prasarana pertanian yang terbangun**	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipeliha	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
				Terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
				Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskeswan	Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Puskeswan	
				Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	
			Meningkatnya kesehatan hewan dan terpenuhinya jaminan keamanan produk hewan bagi masyarakat		**Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)**	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	
				Terjaminnya Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular yang terjamin**	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	
				Tertanggulanginya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	
				Terbentuknya kader zoonosis	Jumlah kader zoonosis	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terawasinya Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan yang terawasi**	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	
				Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapanpersyaratan teknis untukpemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	
				Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	
				Terawasi dan terperiksanya kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	
				Terkendalinya Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	
				Terkelolanya Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner yang terkelola**	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	
				Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	**Persentase Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner yang diterapkan dan diawasi**	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	
				Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	
				Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitas	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitas	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	
				Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	
				Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	
				Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	
				Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	**Persentase Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan yang diterapkan dan diawasi**	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**	
				Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	
			Meningkatnya bencana pertanian yang ditanggulangi		**Presentase Luas Areal Penanggulangan Bencana Pertanian**	**Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terkendalinya dan Tertanggulanginya Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	**Persentase bencana pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi**	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	
				Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
				Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan,Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
				Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
				Tertanggulanginya Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	
				Tertanggulanginya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
				Terlaksananya Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	
			Meningkatnya kapasitas penyuluh dan petani		**Persentase kelompok tani kategori utama**	**Program Penyuluhan Pertanian**	
				Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	**Persentase Penyuluhan Pertanian yang terlaksana**	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
				Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
				Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
				Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	
				Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	
				Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap		**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**	**Program pengelolaan perikanan tangkap**	
				Terlaksananya Pengelolaan Penangkapan Ikan di	**Tersedianya data dan informasi pengelolaan penangkapan ikan**	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		**Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	
				Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
				Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
				Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
				Terlaksananya pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kab/kota	**Terlaksananya pembinaan peningkatan serta fasilitasi pemberdayaan nelayan melalui peningkatan kapasitas**	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	
				Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
				Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
				Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
				Terlaksananya pengelolaan dan penyelenggaraan TPI	**Terlaksananya pembinaan dan penyelenggaraan TPI**	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Ditetapkannya SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
				Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
				Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya rekomendasi perijinan berusaha bagi nelayan**	**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	
				Diterbitkannya Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya		**Jumlah produksi perikanan budidaya**	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	
				Terlaksananya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	**Terlaksananya pembinaan peningkatan pemberdayaan serta fasilitasi pembudidaya ikan melalui peningkatan kapasitas**	**Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**	
				Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	
				Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	
				Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan,	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan,	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya		
				Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
				Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya rekomendasi perijinan berusaha bagi pembudidaya ikan**	**Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	
				Terlayaninya Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudidayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudidayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi bagi pembudidaya ikan**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	
				Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	
				Terlaksananya Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat bagi Pembudidaya Ikan	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	
				Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Jumah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	
				Penyediaan Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia	Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	
			Meningkatnya pengawasan usaha perikanan		**Jumlah Kasus Kelompok Usaha Perikanan yang Diawasi**	**Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan**	
				Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Sumber Daya Pengawasan Perikanan dan pasca panen**	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	
				Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota		
				Usaha pemasaran hasil perikanan dan /atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
				Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
			Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan		**Jumlah Olahan hasil perikanan**	**Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan**	
				Tersedianya Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	**Tersedianya data dan informasi pengolah dan pemasar yang tersedia**	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	
				Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	**Terlaksananya bimbingan dan pelatihan bagi Poklahsar yang terlaksana**	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	
				Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko		
				Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Terlaksananya pembinaan, peningkatan kapasitas serta fasilitasi bagi pengolahan dan pemasar**	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	
				Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	**Terlaksananya Pembinaan dan pelatihan bagi Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil**	
				Terlaksananya Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
				Terlaksananya Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	**Terlaksananya kegiatan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan**	**Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil**	
				Terlaksananya Pengujian mutu dan keamanan hasil	Jumlah sampel yang diuji mutu dan keamanannya	Pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil		perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
				Terlaksananya fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	**Terlaksananya fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan yang dilaksanakan**	**Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil**	
				Terlaksananya fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah peningkatan angka konsumsi ikan untuk skala usah mikro dan skala usaha kecil	Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
				Terlaksananya Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan	**Terlaksananya fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan**	**Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan**	
				Terlaksananya Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang difasilitasi penyediaannya	Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
				Terbitnya rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan /*Good Manufacturing Practices* (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala	**Terlaksananya penerbitan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan /*Good Manufacturing Practices* (GMP)**	**Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				usaha mikro dan skala usaha kecil			
				Terlaksananya Penerbitan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan / *Good Manufacturing Practices* (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan/ *Good Manufacturing Practices* (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan /sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
				Terlaksananya Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan	**Jumlah unit revitalisasi pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan**	**Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil**	
				Terlaksananya revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil yang direvitalisasi	Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
		Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah			Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)		
					Nilai SAKIP		
			Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintah kabupaten/ kota		**Presentase capaian layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	
					Presentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi		
				Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun Sesuai Regulasi**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SK	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terkelolanya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	**Persentase Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKP	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Terkelolanya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	
				Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terselenggaranya pelayanan administrasi umum yang efektif, efisien, dan mendukung kelancaran operasional perangkat daerah	**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.2

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan					42.056.962.500		50.318.974.921		52.318.974.921		53.318.974.921		54.318.974.921		54.318.974.921	
Urusan Pangan					2.455.000.000		2.164.112.000		2.164.112.000		2.164.112.000		2.164.112.000		2.164.112.000	
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	**Meningkatnya ketersediaan cadangan pangan**	**Persentase Cadangan Pangan**	11,91 %	7,58	306.000.000	7,58	306.169.000	7,58	306.169.000	7,58	306.169.000	7,58	306.169.000	7,58	306.169.000	
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan**	**Persentase Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan**	100%	100	306.000.000	100	306.169.000	100	306.169.000	100	306.169.000	100	306.169.000	100	306.169.000	
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	0	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan	1	1	6.000.000	1	6.169.000	1	6.169.000	1	6.169.000	1	6.169.000	1	6.169.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Infrastruktur Logistik	Infrastruktur Logistik														
Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	**Meningkatnya Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	**Konsumsi energi per kapita per hari**	**2189 kkal/kapita/hari**	**2100**	**2.118.000.000**	**2100**	**1.791.253.800**	**2100**	**1.791.253.800**	**2100**	**1.791.253.800**	**2100**	**2.791.253.800**	**2100**	**1.791.253.800**	
		Konsumsi protein perkapita per hari	**66,5 gram/kapita/hari**	**57**		**57**		**57**		**57**		**57**		**57**		
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	**Tersedia dan Tersalurkannya Pangan Pokok atau Pangan Lainnya**	**Persentase Pangan Pokok atau Pangan Lainnya yang tersalurkan**	**100%**	**100**	**301.500.000**	**100**	**226.253.800**	**100**	**226.253.800**	**100**	**226.253.800**	**100**	**226.253.800**	**100**	**226.253.800**	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	2	2	260.000.000	2	184.753.800	2	184.753.800	2	184.753.800	2	184.753.800	2	184.753.800	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya														
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	1	5	6.000.000	5	6.000.000	5	6.000.000	5	6.000.000	5	6.000.000	5	6.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	4	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	2	2	5.500.000	2	5.500.000	2	5.500.000	2	5.500.000	2	5.500.000	2	5.500.000	
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	**Terkelolaannya Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Cadangan Pangan yang terkelola**	**100**	**100**	**1.500.000**	**100**	**250.000.000**	**100**	**250.000.000**	**100**	**250.000.000**	**100**	**250.000.000**	**100**	**250.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	15 ton	0	1.500.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	**Tersusunya Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi**	**Persentase Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang tersusun**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**Terlaksananya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Persentase Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi yang tercapai**	**100**	**100**	**1.815.000.000**	**100**	**1.315.000.000**	**100**	**1.315.000.000**	**100**	**2.315.000.000**	**100**	**1.315.000.000**	**100**	**1.315.000.000**	
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 dokumen	1	115.000.000	1	115.000.000	1	115.000.000	1	115.000.000	1	115.000.000	1	115.000.000	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	0 laporan	2	1.700.000.000	2	1.200.000.000	2	1.200.000.000	2	2.200.000.000	2	1.200.000.000	2	1.200.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program Penanganan Kerawanan Pangan	**Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan**	**Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan**	**9,42%**	**8,52**	**16.000.000**	**8,07**	**49.128.600**	**7,62**	**49.128.600**	**7,17**	**49.128.600**	**6,73**	**49.128.600**	**6,73**	**49.128.600**	
Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan	**Tersusunnya Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Persentase Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang tersusun**	**100%**	**100**	**6.500.000**	**100**	**9.128.600**	**100**	**9.128.600**	**100**	**9.128.600**	**100**	**9.128.600**	**100**	**9.128.600**	
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 dokumen	1	6.500.000	1	9.128.600	1	9.128.600	1	9.128.600	1	9.128.600	1	9.128.600	
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Tertanganinya Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**100%**	**100**	**9.500.000**	**100**	**40.000.000**	**100**	**40.000.000**	**100**	**40.000.000**	**100**	**40.000.000**	**100**	**40.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1	9.500.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pengawasan Keamanan Pangan	**Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan**	**Persentase produk pangan segar yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan**	**94,70 %**	**92**	**15.000.000**	**94**	**17.560.600**	**96**	**17.560.600**	**98**	**17.560.600**	**100**	**17.560.600**	**100**	**17.560.600**	
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Keamanan Pangan Segar Daerah yang terawasi**	**100%**	**100**	**15.000.000**	**100**	**17.560.600**	**100**	**17.560.600**	**100**	**17.560.600**	**100**	**17.560.600**	**100**	**17.560.600**	
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	3 dokumen	3	6.500.000	3	7.560.600	3	7.560.600	3	7.560.600	3	7.560.600	3	7.560.600	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 dokumen	1	8.500.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
Urusan Pertanian					**12.206.194.500**		**18.313.409.940**		**18.313.409.940**		**18.313.409.940**		**18.313.409.940**		**20.313.409.940**	
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	**Meningkatnya produksi pertanian yang didukung oleh sarana pertanian**	**Produksi Tanaman Pangan**	**587.968 ton**	**599.786**	**3.977.000.000**	**605.784**	**8.000.000.000**	**611.842**	**8.000.000.000**	**617.960**	**8.000.000.000**	**624.140**	**8.000.000.000**	**624.140**	**10.000.000.000**	
		Produksi Tanaman Hortikultura	**294.502 ton**	**300.421**		**303.426**		**306.460**		**309.524**		**312.620**		**312.620**		
		Produksi Komoditas Perkebunan	**963 ton**	**1.083**		**1.156**		**1.239**		**1.285**		**1.402**		**1.402**		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Populasi ternak	**3.923.107 ekor**	**3.933.476**		**3.938.245**		**3.944.377**		**3.948.509**		**3.954.738**		**3.954.738**		
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**Terawasinya Penggunaan Sarana Pertanian**	**Persentase Penggunaan Sarana Pertanian yang terawasi**	**100%**	**100**	**2.392.000.000**	**100**	**6.215.000.000**	**100**	**6.215.000.000**	**100**	**6.215.000.000**	**100**	**8.215.000.000**	**100**	**8.215.000.000**	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	5 laporan	5	1.255.000.000	5	1.255.000.000	5	1.255.000.000	5	1.255.000.000	5	1.255.000.000	5	1.255.000.000	
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3 laporan	1	60.000.000	8	1.000.000.000	8	1.000.000.000	8	1.000.000.000	12	2.000.000.000	12	2.000.000.000	
Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	0 Ton	100	535.020.000	1000	2.535.020.000	1000	2.535.020.000	1000	2.535.020.000	2000	3.535.020.000	2000	3.535.020.000	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	0 laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	0 laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	1 laporan	2	45.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	
Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	0 batang	5000	182.000.000	15000	565.000.000	15000	565.000.000	15000	565.000.000	15000	565.000.000	15000	565.000.000	
Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	0 batang	3000	314.980.000	8000	814.980.000	8000	814.980.000	8000	814.980.000	8000	814.980.000	8000	814.980.000	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Terawasinya penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	1 laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	Terawasinya penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	0 laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	0 Anakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	**Terkelolaannya Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme yang terkelola**	**100%**	**100**	**430.000.000**	**100**	**630.000.000**	**100**	**630.000.000**	**100**	**630.000.000**	**100**	**630.000.000**	**100**	**630.000.000**	
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 dokumen	1	430.000.000	1	630.000.000	1	630.000.000	1	630.000.000	1	630.000.000	1	630.000.000	
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Termanfaatkannya SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	1 dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	0 Varietas Unggul Baru (VUB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	0 laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Peningkatan Mutu dan	**Meningkatnya Mutu dan**	**Persentase Mutu dan**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak yang meningkat**														
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	0 laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	0 laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	**Terawasinya Obat Hewan di Tingkat Pengecer**	**Persentase Obat Hewan di Tingkat Pengecer yang terawasi**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	0 laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Terkendalinya dan Terawasinya Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak yang terawasi**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Terlaksananya Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	0 dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Terawasinya Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	0 Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Terawasinya peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	0 Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah	**Tersediaannya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah**	**Persentase benih/bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak yang tersedia**	**100%**	**100**	**1.155.000.000**	**100**	**1.155.000.000**	**100**	**1.155.000.000**	**100**	**1.155.000.000**	**100**	**1.155.000.000**	**100**	**1.155.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kabupaten/Kota Lain	**Kabupaten/Kota Lain**															
Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0 ton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	320 ekor	975	1.155.000.000	975	1.155.000.000	975	1.155.000.000	975	1.155.000.000	975	1.155.000.000	975	1.155.000.000	
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	**Meningkatnya kualitas prasarana pertanian**	**Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik (irigasi, JUT)**	**22,38 %**	**23,23**	**3.993.699.500**	**23,73**	**5.429.034.750**	**24,23**	**5.429.034.750**	**24,73**	**5.429.034.750**	**25,23**	**5.429.034.750**	**25,23**	**5.429.034.750**	
Pengembangan Prasarana Pertanian	**Berkembangnya prasarana pertanian**	**Persentase prasarana pertanian yang berkembang**	**100%**	**100**	**1.776.000.000**	**100**	**1.826.000.000**	**100**	**1.826.000.000**	**100**	**1.826.000.000**	**100**	**1.826.000.000**	**100**	**1.826.000.000**	
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	12 laporan	12	1.696.000.000	12	1.696.000.000	12	1.696.000.000	12	1.696.000.000	12	1.696.000.000	12	1.696.000.000	
Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	0 Ha	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Terkendali dan termanfaatkan nya prasarana pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Terkendali dan termanfaatkan nya prasarana pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Terkendali dan termanfaatkan nya prasarana pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Terkendali dan termanfaatkan nya prasarana pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	terwujudkan peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	0 dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B di Kabupaten/Kota	Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B yang dikelola	0 dokumen	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	
Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B	0 dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	0 dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pembangunan Prasarana Pertanian	**Terbangunnya Prasarana Pertanian**	**Persentase prasarana pertanian yang terbangun**	**100%**	**100**	**2.217.699.500**	**100**	**3.603.034.750**	**100**	**3.603.034.750**	**100**	**3.603.034.750**	**100**	**3.603.034.750**	**100**	**3.603.034.750**	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	18 unit	10	1.017.699.500	11	1.217.699.500	11	1.217.699.500	11	1.217.699.500	11	1.217.699.500	11	1.217.699.500	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 unit	0	0	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 unit	0	0	5	485.335.250	5	485.335.250	5	485.335.250	5	485.335.250	5	485.335.250	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	24 unit	15	1.200.000.000	17	1.400.000.000	17	1.400.000.000	17	1.400.000.000	17	1.400.000.000	17	1.400.000.000	
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Puskeswan	Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskeswan	Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	0 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	0 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	**Meningkatnya kesehatan hewan dan terpenuhinya jaminan keamanan produk hewan bagi masyarakat**	**Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)**	**10,64 %**	**11,08**	**680.915.000**	**11,24**	**767.447.720**	**11,39**	**767.447.720**	**11,58**	**767.447.720**	**12,22**	**767.447.720**	**12,22**	**767.447.720**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Terjaminnya Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular yang terjamin**	**100%**	**100**	**60.000.000**	**100**	**106.532.720**	**100**	**106.532.720**	**100**	**106.532.720**	**100**	**106.532.720**	**100**	**106.532.720**	
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Tertanggulangi nya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	0 laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Terbentuknya kader zoonosis	Jumlah kader zoonosis	0 orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 laporan	1	60.000.000	1	106.532.720	1	106.532.720	1	106.532.720	1	106.532.720	1	106.532.720	
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	**Terawasinya Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan yang terawasi**	**100%**	**100**	**30.000.000**	**100**	**40.000.000**	**100**	**40.000.000**	**100**	**40.000.000**	**100**	**40.000.000**	**100**	**40.000.000**	
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapanpersyaratan teknis untukpemasukan dan/atau pengeluaran HPM	12 laporan	12	30.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	0 laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Terawasi dan terperiksanya kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	0 laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Terkendalinya Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	0 laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Terkelolanya Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner yang terkelola**	**100%**	**100**	**530.915.000**	**100**	**530.915.000**	**100**	**530.915.000**	**100**	**530.915.000**	**100**	**530.915.000**	**100**	**530.915.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa MedikVeteriner	12 laporan	12	530.915.000	12	530.915.000	12	530.915.000	12	530.915.000	12	530.915.000	12	530.915.000	
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	**Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Persentase Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner yang diterapkan dan diawasi**	**100%**	**100**	**30.000.000**	**100**	**45.000.000**	**100**	**45.000.000**	**100**	**45.000.000**	**100**	**45.000.000**	**100**	**45.000.000**	
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 laporan	1	6.500.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitas	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitas	0 unit usaha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	0 orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan	0 produk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	3 unit usaha	3	23.500.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	**Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**	**Persentase Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan yang diterapkan dan diawasi**	**100%**	**100**	**30.000.000**	**100**	**45.000.000**	**100**	**45.000.000**	**100**	**45.000.000**	**100**	**45.000.000**	**100**	**45.000.000**	
Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	3000 unit	1000	30.000.000	1000	45.000.000	1000	45.000.000	1000	45.000.000	1000	45.000.000	1000	45.000.000	
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	**Meningkatnya bencana pertanian yang ditanggulangi**	**Presentase luas areal penanggulangan bencana pertanian**	**53,97**	**50**	**618.000.000**	**50**	**535.695.320**	**50**	**535.695.320**	**50**	**535.695.320**	**50**	**535.695.320**	**50**	**535.695.320**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	**Terlaksananya pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Persentase bencana pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi**	**100%**	**100**	**618.000.000**	**100**	**535.695.320**	**100**	**535.695.320**	**100**	**535.695.320**	**100**	**535.695.320**	**100**	**535.695.320**	
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	2000 ha	2500	606.293.900	2500	523.989.220	2500	523.989.220	2500	523.989.220	2500	523.989.220	2500	523.989.220	
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	0 ha	2	11.706.100	2	11.706.100	2	11.706.100	2	11.706.100	2	11.706.100	2	11.706.100	
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura,	Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan,	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman	0 ha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
dan Perkebunan	Hortikultura, dan Perkebunan	Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Tertanggulanginya Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	0 laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Tertanggulanginya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	0 laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	Terlaksananya Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	0 laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program Penyuluhan Pertanian	**Meningkatnya kapasitas penyuluh dan petani**	**Persentase kelompok tani kategori utama**	**0,07%**	**0,13**	**2.936.580.000**	**0,2**	**1.581.232.150**	**0,27**	**3.581.232.150**	**0,33**	**3.581.232.150**	**0,4**	**3.581.232.150**	**0,46**	**3.581.232.150**	
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**Terlaksananya Penyuluhan Pertanian**	**Persentase Penyuluhan Pertanian yang terlaksana**	**100%**	**100**	**2.936.580.000**	**100**	**1.581.232.150**	**100**	**3.581.232.150**	**100**	**3.581.232.150**	**100**	**3.581.232.150**	**100**	**3.581.232.150**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	14 unit	14	2.449.000.000	14	493.652.150	14	2.493.652.150	14	2.493.652.150	14	2.493.652.150	14	2.493.652.150	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 unit	9	177.500.000	9	277.500.000	9	277.500.000	9	277.500.000	9	277.500.000	9	277.500.000	
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	0 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Terbentuknya dan Terselenggarannya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	12 unit	0	0	6	500.000.000	6	500.000.000	6	500.000.000	6	500.000.000	6	500.000.000	
Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	0 orang	66	310.080.000	66	310.080.000	66	310.080.000	66	310.080.000	66	310.080.000	66	310.080.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	0 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	0 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	0 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Urusan Perikanan					**7.126.037.800**											
Program pengelolaan perikanan tangkap	**Meningkatnya produksi perikanan tangkap**	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**	**21.009 Ton**	**17.714**	**2.099.000.000**	**18.069**	**2.380.300.000**	**18.430**	**2.548.204.000**	**18.799**	**2.610.730.120**	**19.174**	**2.675.132.024**	**19.174**	**2.675.132.024**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Terlaksananya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Tersedianya data dan informasi pengelolaan penangkapan ikan**	**2 Kegiatan**	**3**	**1.210.000.000**	**3**	**1.246.300.000**	**3**	**1.394.104.000**	**3**	**1.435.927.120**	**3**	**1.479.004.934**	**3**	**1.479.004.934**	
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	2	110.000.000	2	113.300.000	2	116.699.000	2	120.199.970	2	123.805.969	2	123.805.969	
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	50 Unit	50	650.000.000	50	669.500.000	50	800.000.000	50	824.000.000	50	848.720.000	50	848.720.000	
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	0 Unit	50	450.000.000	50	463.500.000	50	477.405.000	50	491.727.150	50	506.478.965	50	506.478.965	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kab/kota**	**Terlaksananya pembinaan peningkatan serta fasilitasi pemberdayaan nelayan melalui peningkatan kapasitas**	**2 Kegiatan**	**4**	**580.000.000**	**4**	**820.000.000**	**4**	**840.100.000**	**4**	**860.803.000**	**4**	**882.127.090**	**4**	**882.127.090**	
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang	50	80.000.000	50	120.000.000	50	123.600.000	50	127.308.000	50	131.127.240	50	131.127.240	
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	0 Kelompok	3	150.000.000	3	200.000.000	3	206.000.000	3	212.180.000	3	218.545.400	3	218.545.400	
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	0 Unit Usaha	3	200.000.000	3	350.000.000	3	360.500.000	3	371.315.000	3	382.454.450	3	382.454.450	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	0 Unit	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	**Terlaksananya pengelolaan dan penyelenggaraan TPI**	**Terlaksananya pembinaan dan penyelenggaraan TPI**	**2 Kegiatan**	**2**	**254.000.000**	**2**	**254.000.000**	**2**	**254.000.000**	**2**	**254.000.000**	**2**	**254.000.000**	**2**	**254.000.000**	
Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Ditetapkannya SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5 TPI	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	8 Layanan	8	154.000.000	8	154.000.000	8	154.000.000	8	154.000.000	8	154.000.000	8	154.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya rekomendasi perijinan berusaha bagi nelayan**	**1 Kegiatan**	**1**	**55.000.000**	**1**	**60.000.000**	**1**	**60.000.000**	**1**	**60.000.000**	**1**	**60.000.000**	**1**	**60.000.000**	
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Diterbitkannya Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	100 Rekomendasi	100	55.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	**Meningkatnya produksi perikanan budidaya**	**Jumlah produksi perikanan budidaya**	**19.924 Ton**	**20.325**	**2.355.022.800**	**20.529**	**4.575.209.400**	**20.734**	**2.657.116.182**	**20.941**	**4.820.300.805**	**21.151**	**4.886.499.549**	**21.151**	**4.886.499.549**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	**Terlaksananya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**	**Terlaksananya pembinaan peningkatan pemberdayaan serta fasilitasi pembudidaya ikan melalui peningkatan kapasitas**	**4 Kegiatan**	**4**	**651.022.800**	**4**	**2.693.709.400**	**4**	**685.671.182**	**4**	**2.636.530.405**	**4**	**2.655.216.037**	**4**	**2.655.216.037**	
Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	8 Kelompok	8	300.000.000	8	309.000.000	8	318.270.000	8	327.818.100	8	337.652.643	8	337.652.643	
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	3 Kelompok	3	135.000.000	3	139.050.000	3	143.221.500	3	147.518.145	3	151.943.689	3	151.943.689	
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	3 Kelompok	3	135.000.000	3	139.050.000	3	143.221.500	3	147.518.145	3	151.943.689	3	151.943.689	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	17	81.022.800	17	2.106.609.400	17	80.958.182	17	2.013.676.015	17	2.013.676.015	17	2.013.676.015	
Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya rekomendasi perijinan berusaha bagi pembudidaya ikan**	**1 Kegiatan**	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**	
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlayaninya Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudidayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudidayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Rekomendasi	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi bagi pembudidaya ikan**	**5 Kegiatan**	**9**	**1.654.000.000**	**9**	**1.831.500.000**	**9**	**1.921.445.000**	**9**	**2.133.770.400**	**9**	**2.181.283.512**	**9**	**2.181.283.512**	
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	11 Unit	13	850.000.000	13	875.500.000	13	901.765.000	13	1.100.000.000	13	1.133.000.000	13	1.133.000.000	
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	3 Dokumen	3	200.000.000	3	206.000.000	3	212.180.000	3	218.545.400	3	225.101.762	3	225.101.762	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	2	174.000.000	2	250.000.000	2	257.500.000	2	265.225.000	2	273.181.750	2	273.181.750	
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	0 Orang	30	150.000.000	30	200.000.000	30	250.000.000	30	250.000.000	30	250.000.000	30	250.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Terlaksananya Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat bagi Pembudidaya Ikan	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	0 Unit	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	
Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Jumah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	0 Dokumen	1	30.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Penyediaan Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia	0 Unit	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	**Meningkatnya pengawasan usaha perikanan**	**Jumlah Kasus Kelompok Usaha Perikanan yang Diawasi**	**4%**	**2,88**	**150.000.000**	**2,79**	**100.000.000**	**2,71**	**100.000.000**	**2,64**	**100.000.000**	**2,56**	**100.000.000**	**2,56**	**100.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Sumber Daya Pengawasan Perikanan dan pasca panen**	**1 Dokumen**	**3**	**150.000.000**	**3**	**100.000.000**	**3**	**100.000.000**	**3**	**100.000.000**	**3**	**100.000.000**	**3**	**100.000.000**	
Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	0 Pelaku Usaha	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	
Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Usaha pemasaran hasil perikanan dan /atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	0 Pelaku Usaha	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	0 Pelaku Usaha	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	**Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan**	**Jumlah Olahan hasil perikanan**	**13.212 Ton**	**12.718**	**2.522.015.000**	**12.739**	**2.602.400.000**	**12.765**	**2.606.448.000**	**12.797**	**2.610.576.960**	**12.837**	**2.614.788.499**	**12.837**	**2.614.788.499**	
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	**Tersedianya Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Tersedianya data dan informasi pengolah dan pemasar yang tersedia**	**3 Dokumen**	**3**	**65.000.000**	**3**	**65.000.000**	**3**	**65.000.000**	**3**	**65.000.000**	**3**	**65.000.000**	**3**	**65.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	3 Dokumen	3	65.000.000	3	65.000.000	3	65.000.000	3	65.000.000	3	65.000.000	3	65.000.000	
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	**Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Terlaksananya bimbingan dan pelatihan bagi Poklahsar yang terlaksana**	**1 Kegiatan**	**1**	**680.000.000**	**1**	**680.000.000**	**1**	**680.000.000**	**1**	**680.000.000**	**1**	**680.000.000**	**1**	**680.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	6 Unit usaha	5	680.000.000	5	680.000.000	5	680.000.000	5	680.000.000	5	680.000.000	5	680.000.000	
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Terlaksananya pembinaan, peningkatan kapasitas serta fasilitasi bagi pengolahan dan pemasar**	**2 Kegiatan**	**2**	**177.015.000**	**2**	**202.400.000**	**2**	**206.448.000**	**2**	**210.576.960**	**2**	**214.788.499**	**2**	**214.788.499**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000 Ton	10.000	120.000.000	10.000	122.400.000	10.000	124.848.000	10.000	127.344.960	10.000	129.891.859	10.000	129.891.859	
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	100 Pelaku Usaha	100	57.015.000	100	80.000.000	100	81.600.000	100	83.232.000	100	84.896.640	100	84.896.640	
Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	**Terlaksananya pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil**	**Terlaksananya Pembinaan dan pelatihan bagi Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**0 Kegiatan**	**1**	**150.000.000**	**1**	**200.000.000**	**1**	**200.000.000**	**1**	**200.000.000**	**1**	**200.000.000**	**1**	**200.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Terlaksananya Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	0 unit usaha	3	150.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	
Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	**Terlaksananya Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil**	**Terlaksananya kegiatan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan**	**0 kegiatan**	**1**	**30.000.000**	**1**	**35.000.000**	**1**	**35.000.000**	**1**	**35.000.000**	**1**	**35.000.000**	**1**	**35.000.000**	
Pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Terlaksananya Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah sampel yang diuji mutu dan keamanannya	0 sampel	10	30.000.000	10	35.000.000	10	35.000.000	10	35.000.000	10	35.000.000	10	35.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	**Terlaksananya fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil**	**Terlaksananya fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan yang dilaksanakan**	**0 kegiatan**	**1**	**120.000.000**	**1**	**120.000.000**	**1**	**120.000.000**	**1**	**120.000.000**	**1**	**120.000.000**	**1**	**120.000.000**	
Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Terlaksananya fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah peningkatan angka konsumsi ikan untuk skala usah mikro dan skala usaha kecil	0 kg/kapita/tahun	36	120.000.000	36	120.000.000	36	120.000.000	36	120.000.000	36	120.000.000	36	120.000.000	
Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan	**Terlaksananya Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan**	**Terlaksananya fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan**	**0 unit**	**3**	**600.000.000**	**3**	**600.000.000**	**3**	**600.000.000**	**3**	**600.000.000**	**3**	**600.000.000**	**3**	**600.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Terlaksananya Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang difasilitasi penyediaannya	0	3 unit	600.000.000	3 unit	600.000.000	3 unit	600.000.000	3 unit	600.000.000	3 unit	600.000.000	3 unit	600.000.000	
Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan	**Terbitnya rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan /*Good Manufacturing Practices* (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan**	**Terlaksananya penerbitan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan /*Good Manufacturing Practices* (GMP)**	**0 rekomendasi**	**3**	**100.000.000**	**3**	**100.000.000**	**3**	**100.000.000**	**3**	**100.000.000**	**3**	**100.000.000**	**3**	**100.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
skala usaha kecil	**skala usaha kecil**															
Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan /sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Terlaksananya Penerbitan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan /*Good Manufacturing Practices* (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan/*Good Manufacturing Practices* (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil	0 rekomendasi	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	
Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	**Terlaksananya Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan**	**Jumlah unit revitalisasi pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan**	**0 unit**	**3**	**600.000.000**	**3**	**600.000.000**	**3**	**600.000.000**	**3**	**600.000.000**	**3**	**600.000.000**	**3**	**600.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Terlaksananya revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil yang direvitalisasi	0	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintah kabuoaten/ kota**	**Presentase capaian layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi**	**100%**	**100**	**26.565.768.000**	**100**	**29.288.695.186**	**100**	**29.288.695.186**	**100**	**29.288.695.186**	**100**	**29.288.695.186**	**100**	**29.288.695.186**	
		Presentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara tepat waktu dan sesuai ketentuan**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi**	**100%**	**100**	**154.000.000**	**100**	**156.927.186**	**100**	**141.802.186**	**100**	**156.927.186**	**100**	**156.927.186**	**100**	**156.927.186**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5	62.330.000	5	65.257.186	5	65.257.186	5	65.257.186	5	65.257.186	5	65.257.186	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1	11.400.000	1	11.400.000	1	11.400.000	1	11.400.000	1	11.400.000	1	11.400.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	2	15.125.000	2	15.125.000	2	7.125.000	2	15.125.000	2	15.125.000	2	15.125.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1	11.400.000	1	11.400.000	1	11.400.000	1	11.400.000	1	11.400.000	1	11.400.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	2	15.125.000	2	15.125.000	2	8.000.000	2	15.125.000	2	15.125.000	2	15.125.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	3	16.895.000	3	16.895.000	3	16.895.000	3	16.895.000	3	16.895.000	3	16.895.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1	21.725.000	1	21.725.000	1	21.725.000	1	21.725.000	1	21.725.000	1	21.725.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 berita acara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terkelolanya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**	**Persentase Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi**	**100%**	**100**	**22.890.226.000**	**100**	**24.330.226.000**	**100**	**24.330.226.000**	**100**	**24.330.226.000**	**100**	**24.330.226.000**	**100**	**24.330.226.000**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 orang	115	22.823.226.000	115	24.263.226.000	115	24.263.226.000	115	24.263.226.000	115	24.263.226.000	115	24.263.226.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	4000 dokumen	4000	21.000.000	4000	21.000.000	4000	21.000.000	4000	21.000.000	4000	21.000.000	4000	21.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	18	34.500.000	18	34.500.000	18	34.500.000	18	34.500.000	18	34.500.000	18	34.500.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terkelolanya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi**	**100%**	**100**	**22.800.000**	**100**	**22.800.000**	**100**	**22.800.000**	**100**	**22.800.000**	**100**	**22.800.000**	**100**	**22.800.000**	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	12	22.800.000	12	22.800.000	12	22.800.000	12	22.800.000	12	22.800.000	12	22.800.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi**	**100%**	**100**	**200.000.000**	**100**	**200.000.000**	**100**	**200.000.000**	**100**	**200.000.000**	**100**	**200.000.000**	**100**	**200.000.000**	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terselenggaranya pelayanan administrasi umum yang efektif, efisien, dan mendukung kelancaran operasional perangkat daerah**	**Persentase Fasilitasi Administratif Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi**	**100%**	**100**	**793.067.160**	**100**	**993.067.160**	**100**	**993.067.160**	**100**	**993.067.160**	**100**	**993.067.160**	**100**	**993.067.160**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	2	26.901.500	2	26.901.500	2	26.901.500	2	26.901.500	2	26.901.500	2	26.901.500	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	8	17.191.160	8	17.191.160	8	17.191.160	8	17.191.160	8	17.191.160	8	17.191.160	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket rumah tangga yang disediakan	1 paket	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	4	215.926.500	4	215.926.500	4	215.926.500	4	215.926.500	4	215.926.500	4	215.926.500	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1	165.000.000	1	165.000.000	1	165.000.000	1	165.000.000	1	165.000.000	1	165.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	150 dokumen	150	16.048.000	150	16.048.000	150	16.048.000	150	16.048.000	150	16.048.000	150	16.048.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 laporan	150	347.000.000	150	547.000.000	150	547.000.000	150	547.000.000	150	547.000.000	150	547.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**	**100%**	**100**	**57.500.000**	**100**	**57.500.000**	**100**	**57.500.000**	**100**	**57.500.000**	**100**	**57.500.000**	**100**	**57.500.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	15 unit	7	52.500.000	7	52.500.000	7	52.500.000	7	52.500.000	7	52.500.000	7	52.500.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**	**100%**	**100**	**2.102.290.000**	**100**	**2.602.290.000**	**100**	**2.617.415.000**	**100**	**2.602.290.000**	**100**	**2.602.290.000**	**100**	**2.602.290.000**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12	21.500.000	12	21.500.000	12	21.500.000	12	21.500.000	12	21.500.000	12	21.500.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12	16.998.000	12	16.998.000	12	32.123.000	12	16.998.000	12	16.998.000	12	16.998.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12	1.763.792.000	12	2.263.792.000	12	2.263.792.000	12	2.263.792.000	12	2.263.792.000	12	2.263.792.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara**	**100%**	**100**	**345.884.840**	**100**	**925.884.840**	**100**	**925.884.840**	**100**	**925.884.840**	**100**	**925.884.840**	**100**	**925.884.840**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2024	2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 unit	176	158.450.340	176	208.450.340	176	208.450.340	176	208.450.340	176	208.450.340	176	208.450.340	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	25 unit	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	16	125.844.500	16	625.844.500	16	625.844.500	16	625.844.500	16	625.844.500	16	625.844.500	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	20 unit	20	11.590.000	20	41.590.000	20	41.590.000	20	41.590.000	20	41.590.000	20	41.590.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.3

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Ket.
1	2	3	4	5
Jaminan Ketersediaan Bibit unggul dan Pupuk Murah				
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
			Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
			Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	
			Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	
			Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
			Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Ket.
1	2	3	4	5
			Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	
			Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	
			Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	
			Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya hasil Perikanan Tangkap	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	
			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
			Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Ket.
1	2	3	4	5
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
			Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
			Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
			Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
			Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	
3	Program Peningkatan Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya hasil Perikanan Budidaya	**Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil** **Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil**	
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	
			Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
			Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
			Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Ket.
1	2	3	4	5
			Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	
			Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	
			Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	
			Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan perikanan oleh Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan Kabupaten Pemalang pada periode 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat peran sektor pertanian dan perikanan sebagai pilar utama pembangunan ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan petani, serta ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan akan difokuskan pada pencapaian tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta tantangan pembangunan pertanian dan perikanan di daerah. Pengelolaan urusan ini mencakup berbagai aspek, antara lain peningkatan produktivitas dan mutu hasil pertanian dan perikanan, penguatan kelembagaan petani, penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pertanian, pemanfaatan inovasi dan teknologi pertanian perikanan, serta peningkatan akses petani terhadap pasar, informasi, dan pendampingan teknis.

Penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan urusan dilakukan melalui penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah dirancang secara terukur dan relevan. IKU digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, sedangkan IKK digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan penyelenggaraan program dan kegiatan secara teknis dan operasional.

Indikator Kinerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan pada Renstra tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.4

Tabel Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang (IKU)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode Renstra	Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Meningkatnya ketahanan pangan, kontribusi pertanian dan kontribusi perikanan dalam perekonomian daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	81,49	82,00	82,99	83,98	84,96	85,95	85,95	
2	Meningkatnya Keanekargaman dan pemenuhan kecukupan pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	6,2	6	5,8	5,6	5,4	5,2	5,2	
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	96,24	96,99	97,74	98,5	99,25	100	100	
3	Meningkatnya ketahanan pangan, kontribusi pertanian dan kontribusi perikanan dalam perekonomian daerah	Kontribusi pertanian dan perikanan dalam PDRB	%	25,05	25,05	25,05	25,05	25,05	25,05	25,05	
4	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	Produktivitas tanaman pangan (padi)	kw/ha	62,15	62,21	62,28	62,34	62,40	62,46	62,46	
		Produktivitas hortikultura (nanas)	kw/ha	741,42	741,50	741,57	741,65	741,72	741,79	741,79	
		Produktivitas perkebunan (kopi)	kw/ha	15	17	19	20	21	22	22	
		Produksi ternak besar (daging sapi, daging kambing); produksi ternak unggas; produksi telur ayam ras	kg	4.671.940	4.675.855	4.679.425	4.683.965	4.687.099	4.691.230	4.691.230	
		Total Produksi Perikanan	Ton/Tahun	50.191	50.757	51.337	51.929	52.537	53.162	53.162	
5	Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,0	85,3	85,5	85,8	86,0	86,3	86,3	
		Nilai SAKIP	Nilai	68	69	70	71	72	73	73	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.5

Tabel Indikator Kinerja Kunci Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang (IKK)

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Ahir Periode Renstra	Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Persentase Cadangan Pangan	%	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	
2	Produktivitas pertanian per hektar per tahun									
	padi	kw/ha	62,15	62,21	62,28	62,34	62,4	62,46	62,46	
	kopi	kw/ha	15	17	19	20	21	22	22	
3	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	6	6	6	6	6	6	6	
4	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Ton	36.950	37.690	38.444	39.213	39.997	40.798	41.613	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), diperlukan proyeksi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terencana dan terukur. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) lima tahun ke depan menjadi acuan dalam mengoptimalkan potensi daerah serta memastikan ketersediaan sumber pembiayaan yang berkelanjutan. Berikut disajikan tabel target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025-2030 sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 4.6

Target Pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Pemalang

No. Rekening	Uraian	Target					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat (Pemakaian Bahan dan alat pada Puskeswan)	100.000.000	101.266.057	107.342.021	112.709.122	117.217.486	120.734.011
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	80.000.000	80.819.508	85.668.678	89.952.112	93.550.196	96.356.702
4.1.04.03.01.0001	Lain-lain PAD yang sah-Hasil Sewa BMD (Pendapatan Sewa Tanah)	210.000.000	212.382.101	225.125.020	236.381.271	245.836.519	253.211.608
	Jumlah	**390.000.000**	**394.467.666**	**418.135.719**	**439.042.505**	**456.604.201**	**470.302.321**

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan Penting Substansial

Kesimpulan penting substansial Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 telah mengadopsi upaya dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran visi “Pemalang Bercahaya” dan misi “RHAPSODI” pembangunan Kabupaten Pemalang dalam lima tahun ke depan.
2. Tujuan Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 berdasarkan target-target yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan adalah Meningkatnya ketahanan pangan, kontribusi pertanian dan kontribusiperikanan dalam perekonomian di Kabupaten Pemalang dengan sasaran Meningkatnya keanekaragaman dan pemenuhan kecukupan pangan dan Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan serta Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah.
3. Strategi, Kebijakan dan Program dalam Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang pertanian dan perikanan serta dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yaitu Terwujudnya Pemalang Bercahahaya, Bersih, Cakap, Handal dan Mulya dan meralisasikan salah satu tujuan daerah yaitu Meningkatnya daya saing pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan dengan sasaran Meningkatnya daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal.
4. Kegiatan dan Subkegiatan dalam Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan rincian aktivitas-aktivitas konkret yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Pertanian akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2030. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.3 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2030, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang yang berlaku.

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan Renstra berjalan efektif dan selaras dengan tujuan yang ditetapkan, dilakukan evaluasi minimal satu kali

https://jdih.pemalangkab.go.id

dalam satu periode perencanaan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai capaian kinerja, mengidentifikasi hambatan, serta menyusun rekomendasi perbaikan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat lebih tepat sasaran. Hasil evaluasi menjadi dasar penting dalam penyesuaian kebijakan strategis dan perencanaan tahun-tahun berikutnya, guna meningkatkan akuntabilitas serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

https://idip.pemalangkab.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029 merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan dokumen Renstra ini berpedoman pada Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Proses penyusunan Renstra meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, terdiri dari penyusunan poon kinerja dan penyusunan cascading. (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah; (4) Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5) Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (6) Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Tahapan penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disajikan dalam bagan berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Sumber : Inmendagri 2/2025

Dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang. Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen RPJMD disajikan dalam bagan berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Gambar 1.2
Keterkaitan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang

Sumber : Inmendagri 2/2025

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 berdasarkan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimanation Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

https://jdih.pemalangkab.go.id

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

https://jdih.pemalangkab.go.id

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;

https://jdih.pemalangkab.go.id

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi Jawa Tengah
28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupeten Pemalang
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Pemalang;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 60;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045);
37. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 63 Tahun 2007 Tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang
38. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;

https://jdih.pemalangkab.go.id

39. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Tentang Pedoman Penataan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
40. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 105 Tahun 209 Tentang Petunjuk Teknis Pemberkasan Arsip Aktif pada Central File di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
41. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Informasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
42. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2023 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Kabupaten Pemalang;
43. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
44. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
45. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkup Pemerintahan Daerah.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 adalah:

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah di Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang;
3. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
4. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
2. Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) subbab yaitu subbab gambaran pelayanan perangkat daerah dan subbab permasalahan dan isu strategis perangkat daerah.
3. Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, berisi tentang Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, Stretegi Perangakat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 dan Arah Kebijakan Perangakat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029.
4. BAB IV Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, memuat uraian program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.

5. BAB V Penutup, Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PEMALANG

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang, yang kemudian peraturan tersebut diperbaharui menjadi Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang

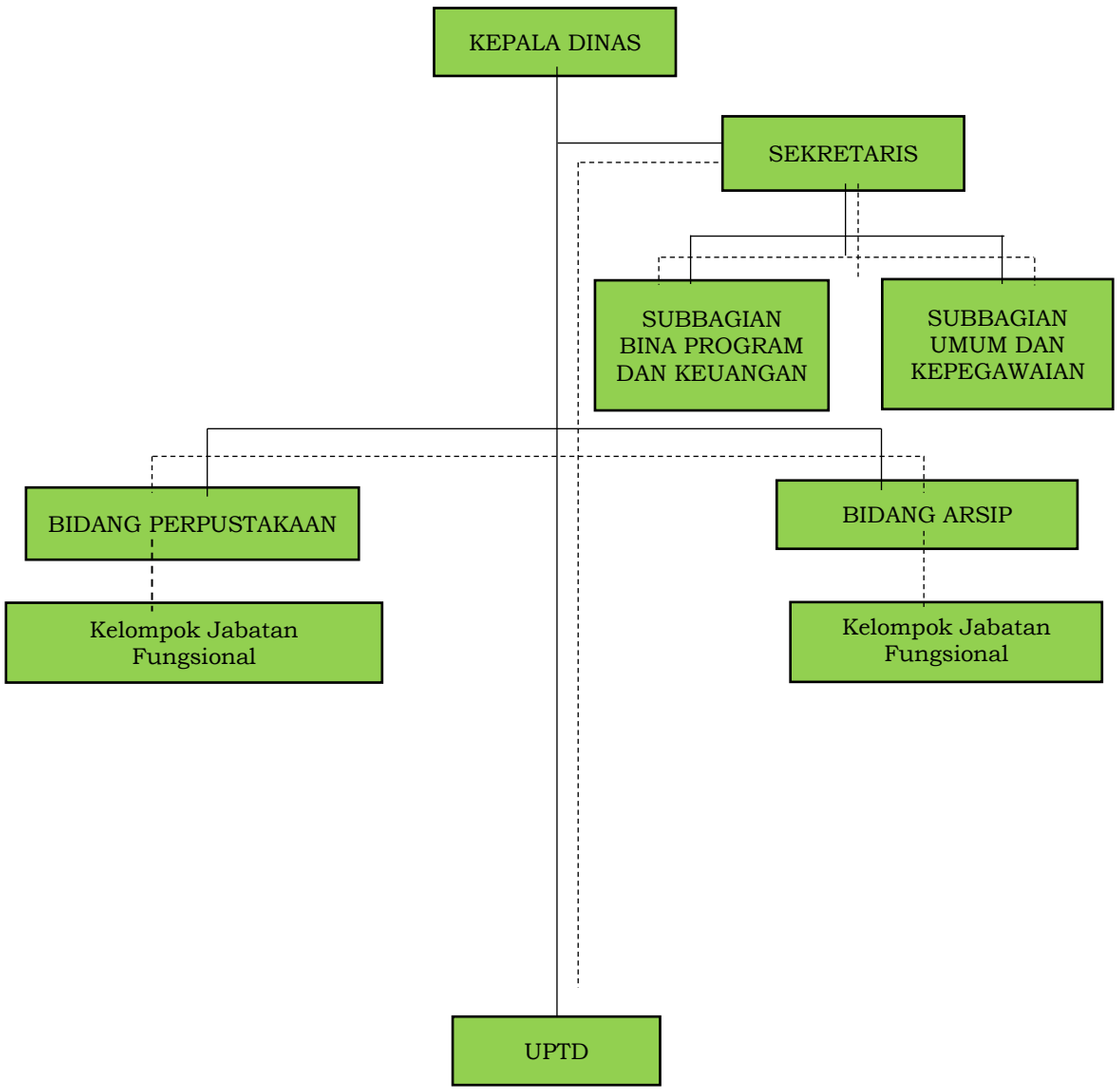

Keterangan :

——————— : Garis Hirarki

- : Garis Koordinasi

Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 tahun 2023 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang, maka uraian tugas jabatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

   a. Tugas dan Fungsi :

      Kepala Dinpusarda mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinpusarda menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

b. Uraian Tugas:

Kepala Dinpusarda mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Renstra dan Renja pada tahun berjalan;
3. melaksanakan koordinasi urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
4. mengendalikan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
5. mengendalikan pelayanan dan penyediaan informasi publik yang berkaitan dengan bahan pustaka dan arsip bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
6. mengendalikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. menetapkan pelaksanaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai urusan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
8. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
9. merumuskan inovasi daerah di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2. Sekretaris

a. Tugas dan Fungsi:

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinpusarda.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinpusarda;
2. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinpusarda;
3. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinpusarda;
4. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinpusarda;
5. penyiapan dan pengelolaan sistem pengendalian intern pemerintah dan koordinasi sistem informasi dan dokumentasi;
6. penyiapan pengelolaan aset milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinpusarda;
7. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinpusarda;
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Uraian Tugas:

Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan.
2. mengoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
3. menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan.
4. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengelolaan dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kedinasan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kerjasama, kehumasan, kearsipan, dokumentasi dan pengadaan barang/jasa.
5. menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian.
6. mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik.
7. menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

bidang kearsipan sesuai dengan unsur SPIP.
8. menyusun konsep inovasi kesekretariatan.
9. mengendalikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang-bidang.
10. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan.
11. menyusun laporan dan menyampaikan laporan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1 Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

a. Tugas:
Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi program dan kegiatan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program dan keuangan.

b. Uraian Tugas:
Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. merencanakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan.
2. menyusun usulan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta dokumen perencanaan lainnya.
3. melaksanakan pengelolaan administrasi bina program dan keuangan.
4. mengelola data urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
5. melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran.
6. menyusun konsep dokumen pertanggungjawaban kinerja yang meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dokumen pertanggungjawaban lainnya.
7. menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta laporan keuangan lainnya.
8. menyiapkan bahan inovasi pada Subbagian Bina Program dan Keuangan.
9. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan sesuai dengan unsur SPIP.
10. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Bina

https://jdih.pemalangkab.go.id

Program dan Keuangan.

11. menyusun laporan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
12. mengevaluasi laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Bina Program dan Keuangan.

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

a. Tugas:

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan

b. Uraian Tugas:

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. merencanakan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
2. mengelola administrasi barang milik daerah meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, penatausahaan, pemanfaatan dan penyusunan laporan barang milik daerah.
3. mengelola administrasi umum meliputi surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan.
4. mengelola administrasi kehumasan meliputi keprotokolan dan informasi publik.
5. mengelola administrasi kerumahtanggaan meliputi pengadaan, penyediaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan jasa penunjang, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor dan fasilitas penyelenggaraan rapat dinas.
6. mengelola administrasi kepegawaian.
7. mengelola ketatalaksanaan meliputi penyusunan sistem dan prosedur kerja.
8. melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik.
9. menyiapkan bahan inovasi Subbagian Umum dan Kepegawaian.
10. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian.
11. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian.
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

3. Kepala Bidang Perpustakaan

a. Tugas dan Fungsi:

Kepala Bidang Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan; dan
2. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Uraian Tugas:

Kepala Bidang Perpustakaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. merencanakan program dan kegiatan Bidang Perpustakaan sesuai dengan dokumen perencanaan.
2. menyusun rancangan kebijakan Bidang Perpustakaan.
3. merumuskan kebijakan teknis di bidang perpustakaan.
4. menyelenggarakan pengelolaan perpustakaan Daerah yang meliputi pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik; pengembangan perpustakaan Daerah; pengembangan kekhasan koleksi perpustakaan khusus; pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional perpustakaan; pembinaan perpustakaan khusus; penjaminan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan; pengembangan perpustakaan rujukan dan perpustakaan keliling; pengembangan pustaka, penyusunan dan pemanfaatan data perpustakaan, serta pengembangan pustakawan.
5. menyelenggarakan pembudayaan gemar membaca melalui sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat, pembangunan dan pengembangan sudut baca, pojok baca, dan rumah baca sesuai dengan standar nasional perpustakaan dan gerakan budaya gemar membaca, pemberian literasi kepada keluarga, sekolah serta masyarakat.
6. menyelenggarakan pelestarian naskah kuno melalui peningkatan kemampuan teknis aparatur, sinergi dengan perpustakaan, pengelolaan naskah kuno yang tersimpan di perpustakaan dan rumah penyimpanan serta penyediaan fasilitas digitalisasi untuk memperluas akses terhadap naskah kuno.

https://jdih.pemalangkab.go.id

7. menyelenggarakan fasilitasi pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah Daerah yang meliputi seleksi dan pengadaan koleksi budaya etnis nusantara serta pengolahan dan penyiangan koleksi budaya etnis nusantara.
8. menyusun konsep inovasi pada Bidang Perpustakaan.
9. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Perpustakaan.
10. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perpustakaan.
11. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Perpustakaan.
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepala Bidang Arsip

a. Tugas dan Fungsi:

Kepala Bidang Arsip mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Arsip menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan; dan
2. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Uraian Tugas:

Kepala Bidang Arsip mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. merencanakan program dan kegiatan Bidang Arsip sesuai dengan dokumen perencanaan.
2. menyusun rancangan kebijakan Bidang Arsip.
3. merumuskan kebijakan teknis di bidang kearsipan.
4. menyelenggarakan pengelolaan arsip statis Daerah yang meliputi akuisisi, pengolahan, pemeliharaan, penyajian dan publikasi informasi arsip statis serta kegiatan penyampaian informasi, naskah asli arsip kepada ANRI; serta akuisisi, pemeliharaan dan restorasi arsip statis.
5. Menyelenggarakan pengelolaan simpul jaringan kearsipan nasional (JIKN) tingkat kabupaten yang meliputi penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan serta pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah
6. Menyelenggarakan fasilitasi perlindungan dan penyelamatan arsip meliputi penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun; perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana melalui evakuasi, identifikasi, pemulihan

https://jdih.pemalangkab.go.id

dan penyimpanan arsip; penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung dan/ atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/ kelurahan; autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media, serta pencarian arsip statis daerah yang dinyatakan hilang.

7. Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup.
8. Menyusun konsep inovasi pada Bidang Arsip.
9. Mengoordinasikan pelaksaan tugas pada Bidang Arsip.
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Arsip.
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Arsip.
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang

Sumber daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang yang meliputi sumber daya manusia/kepegawaian dan sarana prasarana sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

a. Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Jumlah pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Golongan					Jumlah
				I	II	III	IV	VII	
1	Kepala	-	1	-	-	-	1	-	1
2	Sekdin	-	1	-	-	-	1	-	1
3	Kabid	-	1	-	-	-	1	-	1
4	Kasubag	1	1	-	-	2	-	-	2
5	JFT	3	5	-	-	8	-	-	8
6	JFU	5	3	-	3	5	-	-	8
7	PPPK	1	3	-	-	-	-	4	4
8	Non ASN	12	6	-	-	-	-	-	18
Jumlah		22	21	-	3	15	3	4	43

Sumber : Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang, 2025

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perpustakaan dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kearsipan Kabupaten Pemalang hingga saat ini berjumlah 43 orang, terdiri atas 25 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 18 orang Non-ASN. Berdasarkan jenis kelamin, pegawai terdiri dari 22 orang laki-laki (51,16%) dan 21 orang perempuan (48,83%). Komposisi ini mencerminkan tidak adanya kesenjangan gender di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan golongan, ASN terbagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu: golongan II sebanyak 3 orang, golongan III sebanyak 15 orang, golongan IV sebanyak 3 orang, dan golongan VII sebanyak 4 orang. Jumlah terbanyak berada pada golongan III, yaitu sebanyak 15 orang atau sekitar 34,88% dari total pegawai.

Tabel 2.2.
Data Pegawai Berdasar Diklat Kepemimpinan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Diklatpim II	1	-	1
2	Diklatpim III	1	-	1
3	Struktural yang belum diklat	3	1	2
Jumlah		5	1	4

Sumber : Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang, 2025

Dari total lima orang pejabat struktural pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang, tercatat tiga orang di antaranya belum mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) kepemimpinan. Hal ini disebabkan oleh belum terselenggaranya diklat dari instansi yang berwenang.

Tabel 2.3.
Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pasca Sarjana (S2)	2	-	2
2	Sarjana (S1)	13	6	7
3	Diploma	8	2	6
4	SLTA	2	2	-
5	SLTP	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

6	SD	-	-	-
Jumlah ASN		**25**	**10**	**15**
1	Sarjana (S1)	4	2	2
2	Diploma (D3)	3	1	2
3	Diploma (D2)	2	2	-
4	SLTA	8	6	2
5	SD	1	1	-
Jumlah Non ASN		**18**	**12**	**6**

Sumber : Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang, 2025

Berdasarkan tabel data pegawai menurut tingkat pendidikan, terdapat 2 orang yang berpendidikan Pasca Sarjana (S2), 13 orang berpendidikan Sarjana (S1), 8 orang Diploma, dan 2 orang SLTA dari total 25 ASN.

Sedangkan untuk tenaga Non-ASN yang berjumlah 18 orang, mayoritas berpendidikan SLTA sebanyak 8 orang, 4 orang berpendidikan Sarjana (S1), 3 orang Diploma D3, 2 orang Diploma D2, dan 1 orang berpendidikan SD.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara optimal.

Tabel 2.4.
Data Pegawai Berdasar Tingkat Eselon

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	IIB	1	-	1
2	IIIA	1	-	1
3	IIIB	1	-	1
4	IVA	2	1	1
Jumlah		**5**	**1**	**4**

Sumber : Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang, 2025

Berdasarkan data kepegawaian, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang memiliki 5 pejabat struktural dengan berbagai jenjang eselon. Terdapat 1 pejabat pada eselon IIB, 1 pejabat pada eselon IIIA, 1 pejabat pada eselon IIIB, serta 2 pejabat pada eselon IVA. Dari jumlah tersebut, 4 pejabat berjenis kelamin

https://jdih.pemalangkab.go.id

perempuan dan 1 pejabat laki-laki.

a. Sarana dan Prasarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Inventaris Aset Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang

No	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Harga (Rp)
1.3			**ASET TETAP**	
1	**01**		**Tanah**	
			Alun-alun Timur Pemalang	1.096.500.000
			Jln. Suro Hadikusumo Pemalang	714.000.000
			Jumlah KIB A	**1.810.500.000**
2	**01**		**Peralatan dan Mesin**	
		01	Alat-alat Besar	4.950.000
			Portable Generating Set	4.950.000
		02	Alat-alat Angkutan	2.590.377.694
			Station Wagon	2.093.880.894
			Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lainnya (dst.)	70.000.000
			Sepeda Motor	263.796.800
			Mobil Unit Perpustakaan Keliling	162.700.000
		05	Alat Kantor & Rumah Tangga	1.440.025.594
			Lemari Besi/Metal	48.250.000,00
			Lemari Kayu	46.391.000,00
			Rak Besi	189.023.000,00
			Rak Kayu	110.466.480,00
			Filling Cabinet Besi	40.370.000,00
			Brandkas	600.000,00
			Rotary Filling	44.800.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Harga (Rp)
			Roll Opek	28.919.500,00
			Lemari Sorok	8.850.000,00
			Lemari Kaca	13.145.000,00
			Papan Visual/Papan Nama	8.475.000,00
			Alat Penghancur Kertas	20.622.500,00
			Mesin Absensi	10.691.598,00
			Panel Pameran	46.500.000,00
			LCD Proyektor/Infocus	6.020.946,00
			Papan Pengumuman	21.180.000,00
			Alat Kantor Lainnya	26.452.500,00
			Meja Kerja Kayu	2.760.000,00
			Kursi Besi/Metal	21.885.000,00
			Kursi Kayu	138.317.000,00
			Meja Rapat	17.684.000,00
			Meja Ketik	3.000.000,00
			Meja Resepsionis	80.924.000,00
			Meja Panjang	38.354.000,00
			Meja Bundar	1.500.000,00
			Meja Sekolah	11.000.000,00
			Meja 1/2 Biro	58.700.020,00
			Kursi Tamu	8.500.020,00
			Kursi Putar	7.000.000,00
			Kursi Biasa	13.461.280,00
			Bangku Tunggu	4.550.000,00
			Meja Komputer	23.092.000,00
			Meubeleur lainnya	6.650.000,00
			Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	5.580.000,00
			Lemari Es	1.300.000,00
			A.C. Window	67.515.250,00
			A.C. Split	83.792.000,00
			Kipas Angin	1.550.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Harga (Rp)
			Kompor Gas (Alat Dapur)	550.000,00
			Rice Cooker (Alat Dapur)	900.000,00
			Tabung Gas	909.000,00
			Televisi	41.100.000,00
			Loudspeaker	3.059.000,00
			Sound System	32.450.000,00
			Compact Disc	1.200.000,00
			Laser Disc	1.750.000,00
			Karaoke	9.575.000,00
			Wireless	1.693.000,00
			Camera Video	32.977.500,00
			Dispenser	12.525.000,00
			Alat Rumah Tangga Lain-lain	7.000.000,00
			Alat Pemadam/Portable	900.000,00
			Meja Kerja Pejabat Eselon III	4.050.000,00
			Meja Tamu Biasa	14.500.000,00
			Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3.340.000,00
			Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3.000.000,00
			Buffet Kayu	675.000,00
		06	Alat Studio & Alat Komunikasi	44.136.000
			Compact Disc Player	500.000,00
			Microphone/Wireless MIC	600.000,00
			Rak Peralatan	680.000,00
			Layar Film/Projector	40.606.000,00
			Facsimile	1.750.000,00
		10	Komputer	846.790.447
			Mainframe (Komputer Jaringan)	13.320.000,00
			P.C Unit	373.704.771,00
			Lap Top	184.787.799,00
			Personal Komputer lainnya	22.500.000,00
			Hard Disk	1.240.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Harga (Rp)
			Scanner (Peralatan Mini Komputer)	5.930.000,00
			Peralatan Minikomputer lainnya	2.480.000,00
			Printer (Peralatan Personal Komputer)	63.355.014,00
			Scanner (Peralatan Personal Komputer)	171.582.863,00
			Peralatan Personal Komputer lainnya	4.460.000,00
			Modem	630.000,00
			Peralatan Jaringan lainnya	2.800.000,00
			Jumlah KIB B	**4.926.279.735**
3	**03**		**Gedung dan Bangunan**	
		01	Bangunan Gedung	4.284.356.320
			Bangunan Gedung Kantor Permanen	3.577.922.320,00
			Bangunan Gedung Kantor Permanen	74.559.000,00
			Bangunan Gedung Kantor Permanen	231.000.000,00
			Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	9.100.000,00
			Bangunan Gudang Tertutup Permanen	36.650.000,00
			Bangunan Gedung Perpustakaan Lain-lain (dst)	88.108.000,00
			Bangunan Gedung Perpustakaan Lain-lain (dst)	70.628.000,00
			Bangunan Gedung Perpustakaan Lain-lain (dst)	84.320.500,00
			Bangunan Gedung Perpustakaan Lain-lain (dst)	84.320.500,00
			Istana Peninggalan	5.620.000,00
			Pagar Permanen	22.128.000,00
			Jumlah KIB C	**4.284.356.320**
4	**04**		**Jalan, Irigasi dan Jaringan**	
		04	Jaringan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Harga (Rp)
			Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil	3.860.390,00
			Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	13.328.900,00
			Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	3.620.000,00
			Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	9.887.000,00
			Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil	1.600.000,00
			Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain	1.600.000,00
			Jumlah KIB D	**33.896.290**
5	**05**		**Aset Tetap Lainnya**	**1.631.602.200**
		01	Buku dan Perpustakaan	1.631.602.200
			Ilmu Pengetahuan Umum	288.093.120,00
			Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi	8.352.000,00
			Buku Umum Lain-lain	527.373.159,00
			buku filsafat lainnya (dst)	10.776.250,00
			Agama Islam	29.924.198,00
			buku agama lainnya (dst)	23.648.594,00
			Sosiologi	13.114.912,00
			Ilmu Politik	28.480.541,00
			Ekonomi	26.120.400,00
			Hukum	20.101.819,00
			Service Umum Sosial	3.026.835,00
			Perdagangan	2.536.688,00
			Buku Ilmu Sosial Lain-lain	47.037.039,00
			Umum	8.598.590,00
			Pengetahuan Bahasa Indonesia	3.482.600,00
			Buku Ilmu Bahasa Lain-lain	62.428.225,00
			Matematika	4.756.455,00
			Astronomi, Geodesi	2.882.600,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Harga (Rp)
			Fisika dan Mekanika	5.263.160,00
			Kimia	4.669.887,00
			Biologi, Antropologi	4.890.530,00
			buku matematika dan pengetahuan alam lainnya (dst)	7.400.000,00
			Ilmu Kedokteran	40.590.488,00
			Teknologi	57.350.164,00
			Pertanian, Kehutanan, Perikanan	142.152.662,00
			Ilmu Kerumah Tanggaan	22.538.550,00
			Ilmu Perdagangan Khusus Industri	53.550.305,00
			Industri Konstruksi dan Perdagangan	12.177.000,00
			buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst)	55.155.252,00
			Seni Pahat	147.160,00
			Seni Lukis, Ukir	580.300,00
			Permainan dan Olah Raga	2.334.030,00
			Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga Lain-lain	69.257.278,00
			Biografi	5.373.736,00
			Sejarah	1.793.308,00
			Buku Geografi, Biografi , Sejarah Lain-lain	31.464.505,00
			Karya Seni Asli	4.179.860,00
			Jumlah KIB E	**1.631.602.200**
6	**06**		**Konstruksi dalam Pengerjaan**	
		01	Konstruksi dalam Pengerjaan	95.865.000
			Jumlah KIB F	**95.865.000**
1.5			**ASET LAINNYA**	
2	**03**		**Aset Tidak Berwujud**	**283.366.000**
		01	Aset Tidak Berwujud	283.366.000
			Software	238.366.000
	04		**Aset Lain-lain**	**419.613.500**

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Harga (Rp)
		01	Aset Lain-lain	419.613.500
			Peralatan dan Mesin Rusak Berat	375.613.500
			Gedung dan Bangunan Rusak Berat	44.000.000
			Jumlah ASET LAINNYA	**702.979.500**
			Jumlah Total	**13.485.479.045**

Sumber : Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang, 2025

Berdasarkan data inventarisasi Barang Milik Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang memiliki total nilai aset sebesar Rp13.485.479.045. Aset-aset tersebut terdiri dari berbagai klasifikasi sesuai dengan Kodefikasi Barang Milik Daerah, yang dikelompokkan sebagai berikut:

1. Aset Tetap
   a. Tanah dengan total nilai sebesar Rp1.810.500.000, yang terdiri atas:
      - Tanah Alun-alun Timur Pemalang senilai Rp1.096.500.000
      - Tanah di Jln. Suro Hadikusumo Pemalang senilai Rp714.000.000
   b. Peralatan dan Mesin dengan nilai keseluruhan sebesar Rp4.926.279.735, yang mencakup:
      - Alat-alat besar seperti *portable generating set*
      - Alat angkutan berupa *station wagon*, *sepeda motor*, dan *mobil unit perpustakaan keliling*
      - Berbagai alat kantor dan rumah tangga seperti lemari besi, rak, kursi, meja, AC, proyektor, hingga alat multimedia dan peralatan komputer seperti PC, laptop, printer, dan scanner
   c. Gedung dan Bangunan senilai Rp4.284.356.320, yang terdiri dari:
      - Bangunan gedung kantor permanen
      - Bangunan gudang tertutup permanen
      - Bangunan gedung perpustakaan
      - Pagar permanen
   d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan nilai Rp33.896.290, berupa jaringan listrik dan jaringan telepon dengan kapasitas kecil.
   e. Aset Tetap Lainnya berupa buku dan perpustakaan dengan nilai Rp1.631.602.200, yang mencakup koleksi buku dalam berbagai kategori seperti ilmu pengetahuan umum, agama, sosial, politik, ekonomi, hukum, teknologi, kesenian, dan sejarah.
   f. Konstruksi dalam Pengerjaan senilai Rp95.865.000.
2. Aset Lainnya
   a. Aset Tidak Berwujud sebesar Rp283.366.000, berupa perangkat lunak (software).
   b. Aset Lain-lain sebesar Rp419.613.500, terdiri atas peralatan dan mesin rusak berat serta bangunan rusak berat.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Seluruh aset tersebut mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, khususnya dalam penyediaan layanan informasi, pengelolaan arsip, dan penyelenggaraan layanan perpustakaan kepada masyarakat.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang.

Gambaran kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan Tabel 2.7 berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang
Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Satuan	Target	Target	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
			NSPK	IKK		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	6	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	20
	PERPUSTAKAAN																
1	Nilai budaya literasi	%			✔	23,46	24,5	30	35	22,38	28,98	35,05	35,86	95,40	118,29	116,83	102,46
2	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Angka		✔		7,15	7,3	7,6	53	9,96	15,47	14,7	45,12	139,30	211,92	193,42	85,13
3	Persentase perpustakaan terstandarisasi	%				1,43	2,28	3,13	5	1,69	2,03	0,76	5,96	118,18	89,04	24,28	119,20
4	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%		✔		55,33	55,35	55,45	55,5	54,32	49,68	55,55	65,25	98,17	89,76	100,18	117,57
5	Peningkatan angka kunjungan perpustakaan	%				2	4	4	10	2,24	4,85	2,4	10,2	112,00	121,25	60,00	102,00
6	Persentase koleksi perpustakaan yang tersedia	%				68	70	70	70	69,11	71,21	17,32	18,4	101,63	101,73	24,74	26,29

https://jdih.pemalangkab.go.id

7	Peningkatan pengunjung aplikasi perpustakaan digital iPemalang	%				1,5	3	1	1	1,7	3,5	1,076	1,043	113,33	116,67	107,60	104,30
8	Persentase naskah kuno dan budaya etnis nusantara yang dilestarikan	%				NA	55,5	55,5	55,5	0	61,11	61,11	0	0,00	110,11	110,11	0,00
	KEARSIPAN																
9	Indeks kearsipan	Nilai				55,12	56,32	57,12	57,92	38,88	19,31	53,42	50,94	70,54	34,29	93,52	87,95
10	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	%		✔		64,5	64,5	64,5	64,5	74	70,44	88,85	67,82	114,73	109,21	137,75	105,15
11	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	%		✔		4	33	33,33	33,33	4,16	33,33	33,33	33,34	104,00	101,00	100,00	100,03
12	Persentase OPD yang mampu mengelola arsip dengan baik	%				60	70	74	100	60,98	77,08	74,07	100	101,63	110,11	100,09	100,00
13	Persentase penerbitan ijin penggunaan arsip tertutup	%				NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.6 memuat informasi mengenai capaian indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang selama periode pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021–2024. Indikator-indikator tersebut merupakan representasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam dua urusan pemerintahan, yakni urusan perpustakaan dan urusan kearsipan.

Pada urusan perpustakaan, capaian kinerja secara umum menunjukkan tren positif. Beberapa indikator mengalami peningkatan yang signifikan dan melampaui target yang telah ditetapkan. Indikator nilai budaya literasi menunjukkan capaian rasio sebesar 102,46% pada tahun 2024. Sementara itu, indeks pembangunan literasi masyarakat mengalami peningkatan pesat pada tahun 2022 dan 2023, meskipun mengalami penurunan capaian pada tahun 2024 menjadi 85,13% dari target yang direncanakan, hal ini disebabkan karena adanya penurunan angka kunjungan perpustakaan, jumlah koleksi yang belum memadai dan rendahnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan sosialisasi literasi.

Capaian indikator persentase perpustakaan terstandarisasi mengalami fluktuasi, namun berhasil mencapai rasio sebesar 119,20% pada tahun 2024. Indikator nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat menunjukkan capaian yang konsisten dan melampaui target, dengan rasio capaian tertinggi sebesar 117,57% pada tahun 2024.

Indikator lain seperti peningkatan angka kunjungan perpustakaan dan peningkatan pengunjung aplikasi perpustakaan digital iPemalang juga menunjukkan capaian yang positif. Kunjungan perpustakaan mencapai rasio 102,00% dari target tahun 2024, sedangkan capaian pengunjung aplikasi digital mencapai 104,30% dari target. Indikator persentase koleksi perpustakaan yang tersedia menunjukkan bahwa koleksi yang bahan pustaka masih belum cukup memadai.

Namun demikian, capaian indikator persentase naskah kuno dan budaya etnis nusantara yang dilestarikan belum menunjukkan hasil yang optimal. Capaian pada tahun 2021 dan 2024 tercatat sebesar 0%, sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing mencapai 61,11%. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan program penelusuran, dokumentasi, serta pelibatan masyarakat dalam pelestarian naskah kuno dan budaya lokal.

Pada urusan kearsipan, capaian indikator indeks kearsipan mengalami peningkatan pada tahun 2023, namun menurun kembali pada tahun 2024 dengan rasio capaian sebesar 87,95%. Sementara itu, indikator tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja menunjukkan capaian yang konsisten dan melampaui target di seluruh tahun pelaksanaan.

Indikator tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban menunjukkan stabilitas capaian, dengan rasio di atas 100% pada setiap tahun. Indikator persentase perangkat daerah yang mampu mengelola arsip dengan baik juga menunjukkan capaian yang sangat baik, dengan angka capaian 100% pada tahun 2024, sesuai dengan

https://jdih.pemalangkab.go.id

target yang ditetapkan.

Adapun indikator persentase penerbitan izin penggunaan arsip tertutup tidak menunjukkan capaian selama periode Renstra. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap urgensi, regulasi, serta kesiapan perangkat daerah dalam pelaksanaan layanan tersebut.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang selama periode 2021–2024 menunjukkan kecenderungan yang positif dan mendukung pencapaian tujuan strategis perangkat daerah. Meskipun demikian, diperlukan upaya perbaikan pada aspek-aspek tertentu, khususnya dalam hal penguatan sarana prasarana, peningkatan literasi digital, pelestarian budaya lokal, serta optimalisasi pengelolaan arsip secara berkelanjutan.

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai Bab II RPJMD Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Urusan Perpustakaan						
1	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	%	1,53	2,24	4,23	2,4	2,5
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	7,033	9,96	73,68	52,05	45,12
3	Persentase Perpustakaan yang Terstandarisasi	%	0,59	1,69	2,03	0,76	5,96
4	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	%	55,25	54,32	49,68	55,55	65,25
5	Persentase Naskah yang Dikaji	Rasio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Urusan Kearsipan						
6	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkup Pemerintahan Daerah	%	42	38,88	19,31	53,42	50,94
7	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Predikat Pengelolaan Arsi Minimal B	%	N/A	N/A	N/A	N/A	29,27
8	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	7,12	74	70,44	88,85	67,82
9	Persentase Jumlah Arsip yang Dimusnahkan	%	0	0	0	50	61,11

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
10	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggung Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintah, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	%	5,46	4,16	33,33	33,33	33,34

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang, 2025

Tabel 2.7 memuat capaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang selama kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024), sesuai dengan indikator yang tercantum dalam Bab II RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029. Indikator yang ditampilkan mencakup dua urusan pemerintahan, yaitu urusan perpustakaan dan urusan kearsipan.

Pada urusan perpustakaan, capaian indikator *tingkat pemanfaatan perpustakaan* mengalami peningkatan secara fluktuatif. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 4,23%, namun menurun pada tahun 2023 dan sedikit meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 2,5%. Indikator *indeks pembangunan literasi masyarakat* menunjukkan lonjakan signifikan pada tahun 2022 (73,68), namun mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir hingga mencapai 45,12 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan perlunya stabilisasi dan penguatan program literasi secara berkelanjutan.

Capaian *persentase perpustakaan yang terstandarisasi* juga mengalami variasi yang cukup signifikan, dengan capaian tertinggi pada tahun 2024 sebesar 5,96%, setelah sempat mengalami penurunan pada tahun 2023. Indikator *nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat* menunjukkan tren positif dengan peningkatan bertahap dari 49,68% pada tahun 2022 menjadi 65,25% pada tahun 2024. Adapun indikator *persentase naskah yang dikaji* belum memiliki data capaian selama periode 2020–2024, sehingga memerlukan perhatian dalam hal perencanaan dan pelaksanaan program pelestarian naskah budaya lokal ke depan.

Sementara itu, pada urusan kearsipan, indikator *indeks hasil pengawasan kearsipan di lingkup pemerintahan daerah* mengalami penurunan tajam pada tahun 2022, namun berhasil meningkat kembali pada tahun 2023 dan 2024 dengan capaian sebesar 50,94%. Capaian *persentase perangkat daerah yang memiliki predikat pengelolaan arsip minimal B* mulai tercatat pada tahun 2024 dengan nilai sebesar 29,27%.
Indikator *tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja* menunjukkan capaian yang relatif tinggi pada tahun 2021–2023, dengan capaian tertinggi sebesar 88,85% pada tahun 2023. Meski demikian, terjadi penurunan pada tahun 2024 yang perlu menjadi perhatian dalam peningkatan kualitas pengelolaan arsip. Capaian *persentase jumlah arsip yang dimusnahkan* menunjukkan pelaksanaan kegiatan pemusnahan yang mulai berjalan pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 61,11% pada tahun 2024, sebagai bagian dari tata kelola arsip inaktif yang lebih tertib.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Indikator *tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban* menunjukkan tren peningkatan yang signifikan sejak tahun 2022. Capaian tahun 2024 mencapai 33,34%, yang menandakan bahwa sebagian besar arsip penting telah dijaga dan dikelola dengan baik, namun masih diperlukan penguatan kelembagaan, sarana, dan prosedur untuk mencapai target ideal sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Secara umum, capaian indikator dalam tabel ini mencerminkan adanya progres dalam pelayanan urusan perpustakaan dan kearsipan, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal kesinambungan program, optimalisasi pemanfaatan layanan, serta penguatan kapasitas sumber daya pengelola.

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Berdasarkan SDGs

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2	NIHIL					
3						

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Kabupaten Pemalang, 2025

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabuapten Pemalang secara umum adalah seluruh masyarakat Kabupaten Pemalang.

Kelompok sasaran pelayanan pada urusan perpustakaan meliputi:

1. Masyarakat umum, sebagai pengguna layanan bahan bacaan dan informasi literasi.
2. Peserta didik (pelajar dan mahasiswa), yang memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber referensi pendidikan dan pembelajaran.
3. Pendidik dan tenaga kependidikan, untuk menunjang kegiatan pembelajaran berbasis literasi.
4. Komunitas literasi dan organisasi masyarakat, sebagai mitra dalam penyelenggaraan kegiatan literasi dan promosi budaya baca.
5. Anak-anak dan remaja, sebagai bagian dari sasaran wisata edukasi dan pengembangan minat baca usia dini.

Kelompok sasaran pelayanan pada urusan kearsipan terdiri dari:

1. Perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten**,** sebagai objek pembinaan, pengawasan, dan asistensi pengelolaan arsip dinamis maupun statis.
2. ASN dan pejabat pemerintah**,** sebagai pelaksana pengelolaan arsip dalam mendukung akuntabilitas kinerja.
3. Lembaga pendidikan dan arsiparis pemula**,** dalam rangka edukasi dan penguatan kompetensi kearsipan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

4. Masyarakat umum**,** yang membutuhkan informasi arsip statis untuk keperluan penelitian, sejarah, dan layanan informasi publik.

Pihak eksternal yang berkepentingan terhadap pemanfaatan arsip**,** seperti peneliti, akademisi, dan media.

2.2 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai Perangkat Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemrintahana daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.9
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya tingkat kegemaran membaca masyarakat	Ketersediaan bahan bacaan yang terbatas	Belum optimalnya perencanaan pengadaan bahan bacaan berbasis kebutuhan pengguna
		Kegiatan promosi literasi belum optimal	Kegiatan literasi yang diselenggarakan masih terbatas pada momen tertentu (event-based), belum menjadi budaya rutin
		Kurangnya SDM penggerak literasi yang aktif	Belum tersedia sistem pembinaan dan pengembangan kompetensi SDM literasi secara berkelanjutan
			Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan literasi karena minimnya fasilitasi dan dukungan teknis
2	Masih rendahnya literasi masyarakat	Belum optimalnya pemerataan layanan perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum, sekolah, perguruan tinggi, dan khusus belum proporsional dengan jumlah penduduk dan satuan pendidikan
		Koleksi bahan pustaka yang tersedia masih belum mencukupi	Jumlah koleksi bahan pustaka belum memenuhi rasio ideal 1:2 terhadap jumlah penduduk

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Jumlah dan kompetensi SDM pengelola perpustakaan, termasuk tenaga pustakawan, masih terbatas	Belum tersedia strategi pemenuhan kebutuhan SDM berdasarkan beban kerja dan cakupan layanan perpustakaan
			Belum optimalnya pengembangan kompetensi pustakawan dan tenaga pengelola melalui pelatihan berkelanjutan
			Minimnya fasilitasi untuk peningkatan kapasitas SDM dalam bidang literasi, teknologi informasi, dan manajemen perpustakaan
		Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan masih rendah	Strategi promosi dan publikasi layanan perpustakaan belum berjalan secara masif dan tersegmentasi
			Tata ruang dan suasana layanan perpustakaan belum cukup menarik dan nyaman bagi berbagai segmen masyarakat
			Fasilitas perpustakaan belum dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan interaktif dan partisipatif
		Sebagian besar perpustakaan yang dibina belum memenuhi ketentuan dalam Standar Nasional Perpustakaan	Belum optimalnya pembinaan dan pendampingan terhadap perpustakaan agar memenuhi SNP
			Rendahnya pemahaman pengelola perpustakaan sekolah dan desa terhadap indikator SNP
			Belum dilakukan pemetaan kondisi dan kebutuhan pemenuhan SNP pada perpustakaan sekolah dan desa
		Tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan promosi dan sosialisasi perpustakaan masih rendah	Belum terbentuknya komunitas atau relawan literasi yang berperan aktif dalam mendukung sosialisasi perpustakaan
			Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran perpustakaan dalam kehidupan sehari-hari masih rendah

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Jumlah anggota perpustakaan masih rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk	Belum tersedia strategi promosi dan perluasan keanggotaan perpustakaan secara masif dan berkelanjutan
			Sistem pendaftaran dan keanggotaan belum terintegrasi secara digital sehingga belum memudahkan masyarakat untuk mendaftar
3	Belum optimalnya pelestarian naskah kuno sebagai bagian dari warisan budaya lokal	Sebagian besar naskah kuno masih berada di tangan masyarakat dan belum terdokumentasikan secara resmi	Belum tersosialisasikannya prosedur penyerahan, penitipan, atau kerja sama pelestarian naskah kuno secara baik kepada masyarakat
			Belum tersedia skema insentif atau jaminan perlindungan terhadap naskah kuno milik pribadi yang diserahkan atau didokumentasikan
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian naskah kuno masih rendah	Minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian naskah kuno sebagai bagian dari identitas budaya
4	Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pemerintah daerah	Kegiatan pengelolaan arsip belum dilaksanakan secara tertib dan sesuai kaidah kearsipan	Tingkat pemahaman perangkat daerah terhadap regulasi kearsipan masih rendah
			Pembinaan dan pengawasan kearsipan belum berjalan optimal
		SDM kearsipan terbatas dari sisi jumlah dan kompetensi	Belum tersedianya petugas atau unit pengelola arsip pada sebagian besar perangkat daerah
		Sistem informasi kearsipan belum diterapkan secara merata	Sistem Informasi kearsipan terintegrasi belum dilaksanakan secara optimal
		Penyelamatan arsip inaktif dan statis belum optimal	Sarana dan prasarana kearsipan belum memadai
3	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja	Belum tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan PD
			Belum optimalnya penyusunan dokumen penganggaran PD

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		yang berkualitas	Belum optimalnya penyusunan laporan evaluasi kinerja PD
		Belum optimalnya pengadministrasian keuangan	Perlunya penyediaan gaji dan tunjangan ASN setiap bulan
			Belum optimalnya penyusunan laporan keuangan PD
4	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Belum optimalnya pengadministrasian Barang Milik Daerah (BMD)	Belum optimalnya penyusunan perencanaan kebutuhan BMD
			Belum optimalnya penyusunan laporan BMD
		Masih rendahnya kapasitas SDM	Minimnya kegiatan peningkatan kapasitas
		Belum optimalnya penyediaan layanan administrasi umum	Belum tercukupinya sarana dan prasarana kantor yang dibutuhkan
			Penataan arsip belum sesuai ketentuan
		Belum optimalnya penyediaan jasa penunjang untuk memperlancar pelaksanaan tugas	Masih kurangnya penyediaan jasa penunjang pelaksanaan tugas
			Jumlah ASN belum mencukupi kebutuhan
		Belum optimalnya pemeliharaan BMD	Terdapat kendaraan dinas yang harus dipelihara
			Terdapat mebel yang harus dipelihara
			Terdapat peralatan dan mesin yang harus dipelihara
			Terdapat gedung kantor yang harus dipelihara
			Terdapat sarpras pendukung gedung kantor yang harus dipelihara

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalanh, 2025

2.3 Isu Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, isu strategis merupakan permasalahan utama yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah, baik yang bersumber dari kondisi internal perangkat daerah maupun dari dinamika eksternal yang berskala global, nasional, maupun regional.

Isu strategis memerlukan perhatian khusus dalam perumusan kebijakan dan arah pembangunan, karena menyangkut hal-hal yang bersifat mendasar, berdampak luas, dan memerlukan penanganan secara sistematis dalam jangka

https://jdih.pemalangkab.go.id

menengah. Oleh karena itu, identifikasi isu strategis dilakukan melalui analisis terhadap capaian kinerja masa lalu, potensi dan permasalahan yang ada, serta perubahan lingkungan strategis, agar dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang tepat dalam dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah.

Isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dirumuskan dengan mempertimbangkan isu strategis global, Nasional dan Provinsi dan memperhatikan potensi, peluang dan tantangan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selama kurun waktu tahun 2025 – 2029. Isu strategis Global, Nasional dan Provinsi Jawa Tengah dan Isu strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pemalang untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.10
Isu Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan	Isu Klhs Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan			Isu Strategis
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Gedung perpustakaan daerah yang baru dibangun dan representatif	Pembangunan belum sepenuhnya selesai; sarana dan prasarana pendukung layanan masih belum memadai	Akses pendidikan dan informasi yang inklusif	Kebutuhan infrastruktur layanan publik berbasis literasi	Fokus pembangunan SDM dan fasilitas layanan dasar	Keterbatasan anggaran pemenuhan sarpras literasi	Percepatan penyempurnaan pembangunan dan pengadaan sarpras untuk mendukung operasional perpustakaan daerah
Layanan perpustakaan keliling	Belum menjangkau semua wilayah, keterbatasan SDM dan armada	Keadilan akses layanan informasi	Inklusi sosial dan literasi untuk umum	Pemerataan akses informasi	Hambatan geografis dan keterbatasan operasional	Perluasan cakupan layanan perpustakaan keliling untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil
Wisata edukasi anak di perpustakaan	Belum menjadi program unggulan dan masih terbatas segmentasinya	Edukasi non-formal dan ramah anak	Literasi anak sebagai investasi masa depan	Penguatan karakter melalui literasi	Belum banyak sinergi dengan sekolah/komunitas	Pengembangan wisata edukasi anak sebagai daya tarik literasi berbasis kearifan lokal
Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial	Belum semua pustakawan memahami pendekatan layanan berbasis inklusi sosial	Pemberdayaan masyarakat dan keadilan sosial	Akses literasi untuk kelompok rentan Nasional	Transformasi perpustakaan berbasis masyarakat	Terbatasnya pelatihan pustakawan dan pendampingan	Penguatan kapasitas SDM untuk mendorong transformasi perpustakaan inklusif dan partisipatif

https://jdih.pemalangkab.go.id

Potensi Daerah Yang Menjadi	Permasalahan	Isu Klhs Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan			Isu Strategis
Potensi keberadaan naskah kuno dan arsip sejarah lokal	Kegiatan penelusuran naskah kuno belum optimal dan masyarakat masih enggan menyerahkan/membuka akses terhadap naskah yang dimiliki	Pelestarian warisan budaya lokal dan penguatan identitas	Semakin tingginya perhatian terhadap pelestarian memori kolektif budaya	Program nasional penguatan kearifan lokal dan budaya literasi	Belum adanya pendekatan sosial-kultural yang efektif kepada masyarakat pemilik naskah kuno	Peningkatan kegiatan penelusuran, pendekatan kultural, dan pendokumentasian naskah kuno sebagai bagian dari pelestarian warisan sejarah daerah
Ketersediaan arsip vital dan arsip sejarah lokal	Arsip belum terdokumentasi dan terkonservasi dengan baik	Pelestarian warisan budaya dan tata kelola informasi publik	Perlindungan memori kolektif dunia Nasional: Reformasi tata kelola kearsipan nasional	Reformasi tata kelola kearsipan nasional	Kurangnya tenaga arsiparis profesional	Pelestarian dan digitalisasi arsip vital dan sejarah lokal sebagai sumber pengetahuan daerah
Adanya OPD/instansi dengan volume arsip inaktif yang tinggi	Belum ada sistem penataan, penyusutan, dan pemusnahan arsip yang sistematis	Efisiensi tata kelola pemerintahan dan pengurangan limbah kertas	Perlindungan memori kolektif dunia	Reformasi tata kelola kearsipan nasional	Kurangnya tenaga arsiparis profesional	Pelestarian dan digitalisasi arsip vital dan sejarah lokal sebagai sumber pengetahuan daerah
Rencana pemanfaatan ruang sebagai depo arsip daerah	Belum tersedia gedung depo arsip yang representatif	Tata kelola informasi jangka panjang dan keberlanjutan pengelolaan arsip	Tuntutan pengelolaan arsip yang aman dan profesional	Amanat UU No. 43/2009 tentang Kearsipan	Belum tersedianya gedung depo arsip daerah yang representatif dan berkelanjutan sebagai tempat penyimpanan arsip statis	Penyediaan depo arsip yang representatif untuk menjamin kelestarian arsip statis dan mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
Potensi digitalisasi arsip berbasis teknologi	Infrastruktur dan SDM untuk digitalisasi arsip masih terbatas	Transformasi digital dan keberlanjutan informasi	Percepatan digitalisasi sektor publik Nasional	Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Keterbatasan jaringan dan perangkat TI	Penguatan sistem digitalisasi arsip untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas layanan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Potensi Daerah Yang Menjadi	Permasalahan	Isu Klhs Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan			Isu Strategis
informasi						publik
Ketersediaan arsip desa dan dokumen sejarah desa	Belum ada sistem penyelamatan dan pengelolaan arsip desa secara menyeluruh	Pelestarian identitas lokal dan tata kelola desa yang akuntabel	Keadilan akses informasi masyarakat lokal	Penguatan tata kelola desa	Belum adanya sinergi antara dinas dan pemerintah desa	Penyelamatan dan pengelolaan arsip desa sebagai sumber informasi dan penguatan kelembagaan desa

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB III
TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu terus berpacu untuk menangkap peluang yang berkembang, khususnya dalam peningkatan layanan informasi, literasi, dan pengelolaan arsip yang transparan dan akuntabel.

Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, terbuka, serta mampu bersaing dalam pelayanan publik berbasis pengetahuan dan teknologi, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dituntut untuk senantiasa melakukan pembaruan menuju perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

Perubahan tersebut harus dirancang secara terarah, konsisten, dan inklusif, agar mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berfokus pada keseimbangan antara output pelayanan ngan outcome pembangunan sumber daya manusia dan tata kelola arsip daerah.

Sebagai institusi pemerintah daerah yang memiliki tugas di bidang pelayanan publik, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan secara proaktif berperan dalam menyediakan layanan perpustakaan yang inklusif dan bermutu bagi masyarakat, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan arsip di seluruh perangkat daerah guna mendukung akuntabilitas pemerintahan dan pelestarian memori kolektif daerah.

3.1 Tujuan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selama tahun 2025–2029 adalah **“Meningkatkan kualitas literasi masyarakat dan pengelolaan kearsipan”** yang diukur dengan indikator **Indesk Pembangunan Literasi Masyarakat** dan **Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah.** Rumus perhitungan IPLM merupakan kumpulan dari rumus pengukuran 7 (tujuh) komponen unsur pembangunan literasi masyarakat beserta pembaginya yaitu komponen Aspek Masyarakat. Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah yang merupakan penilaian dari ANRI meliputi pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal.

3.2 Sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Dinpusarda Kabupaten Pemalang mempunyai 3 (tiga) sasaran jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2025–2029, yaitu :

1. **“Meningkatnya kualitas perpustakaan dalam pemanfaatan perpustakaan”** yang diukur dengan indikator **Tingkat Pemanfaatan**

https://jdih.pemalangkab.go.id

Perpustakaan. Dengan rumusan Jumlah pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan perhari dalam setahun baik on site maupun online dibagi jumlah penduduk kabupaten/kota pada tahun tahun yang sama x 100%.

2. **"Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah"** yang diukur dengan indikator **Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Predikat Pengelolaan Arsip Minimal B** dengan rumus Jumlah OPD yang memiliki predikat pengelolaan minimal B dibagi total OPD dikali 100%
3. **"Meningkatnya kualitas akuntabilitas perangkat daerah"** yang diukur dengan indikator **Nilai SAKIP** yang diperoleh berdasarkan Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh inspektorat.

Adapun perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan Reformasi Birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel	Meningkatkan kualitas literasi masyarakat dan pengelolaan kearsipan		Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	58,32	60,7	63,08	65,5	67,84	70,22	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Predikat Pengelolaan Arsip Minimal B	29,27	34,14	39,02	43,9	48,78	53,65	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas literasi masyarakat dan pengelolaan kearsipan		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	53	54,4	57,8	60,2	62,6	65	
		Meningkatnya kualitas perpustakaan dalam pemanfaatan perpustakaan	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	2,6	2,88	3,16	3,44	4,1	4,38	

https://jdih.pemalangkab.go.id

3.3 Strategi

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2030, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang menetapkan berbagai strategi dan arah kebijakan yang selaras dengan NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas literasi masyarakat dan pengelolaan kearsipan daerah secara berkelanjutan.

Tujuan 1: Meningkatkan kualitas literasi masyarakat dan pengelolaan kearsipan

Sasaran 1.1: Meningkatnya kualitas pengawasan kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah

Indikator: Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan

Strategi:

- Memperkuat peran Lembaga Kearsipan Daerah dalam pembinaan dan pengawasan
- Mendorong penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di seluruh perangkat daerah
- Menyusun dan menyesuaikan regulasi internal terhadap kebijakan nasional bidang kearsipan
- Menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi pengelola arsip OPD

Sasaran 1.2: Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah

Indikator: Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Predikat Pengelolaan Arsip Minimal B

Strategi:

- Menyelenggarakan bimbingan teknis dan asistensi penyusunan regulasi internal pengelolaan arsip
- Mengembangkan sistem audit internal pengelolaan arsip pada perangkat daerah
- Memberikan penghargaan atau insentif non-fisik bagi perangkat daerah yang mencapai predikat tinggi
- Membangun budaya tertib arsip melalui kampanye dan penguatan kelembagaan

Tujuan 2: Meningkatkan kualitas literasi masyarakat dan pengelolaan kearsipan

Sasaran 2.1: Meningkatnya indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM)

Indikator: IPLM

Strategi:

- Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan bahan bacaan melalui layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial
- Melaksanakan program literasi berbasis komunitas, sekolah, dan keluarga

https://jdih.pemalangkab.go.id

- Memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan literasi digital
- Mendorong kolaborasi multipihak dengan lembaga pendidikan, komunitas literasi, dan sektor swasta

Sasaran 2.2: Meningkatnya kualitas perpustakaan dalam pemanfaatan perpustakaan
Indikator: Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan
Strategi:

- Pengembangan layanan perpustakaan yang ramah anak, inklusif, dan berbasis budaya lokal
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pelayanan perpustakaan (digitalisasi layanan)
- Penguatan promosi perpustakaan melalui media sosial dan kegiatan publik
- Penyediaan sarana prasarana yang mendukung kenyamanan pengunjung

3.4 Arah Kebijakan

Penahapan pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang merupakan prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah. Setiap tahapan dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat tata kelola, serta meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan kearsipan secara berkelanjutan. Penahapan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.2
Penahapan Renstra

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
Memperkuat digitalisasi layanan perpustakaan dan kearsipan Melalui pemanfaatan aplikasi iPemalang, digitalisasi koleksi perpustakaan, serta penguatan sistem arsip elektronik di perangkat daerah.	Meningkatkan infrastruktur layanan perpustakaan dan kearsipan di wilayah desa dan kelurahan melalui peningkatan kualitas ruang layanan perpustakaan, penambahan pojok baca, dan penguatan depo arsip wilayah.	Penguatan pemberdayaan masyarakat melalui program literasi berbasis inklusi sosial dan peningkatan kompetensi pengelola arsip desa/ kelurahan Melalui pelatihan dan bimbingan teknis.	Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keberlanjutan layanan perpustakaan dan kearsipan	Penguatan kelembagaan dan sistem pengawasan Melalui peningkatan indeks kearsipan, peningkatan nilai IPLM, pemusnahan arsip sesuai prosedur, dan penyusunan rancangan Renstra periode berikutnya yang berbasis evaluasi kinerja.

Tabel 3.3
Perumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) sebagai indikator nasional literasi masyarakat.	Peningkatan literasi masyarakat dengan fokus pembentukan perpustakaan digital.	Penguatan program peningkatan literasi melalui perluasan akses bahan bacaan, digitalisasi koleksi, dan pengembangan aplikasi perpustakaan digital daerah.	Urusan Perpustakaan
	Implementasi standar nasional perpustakaan sesuai Peraturan Kepala Perpusnas RI.	Peningkatan literasi masyarakat dengan fokus pembentukan perpustakaan digital.	Peningkatan jumlah perpustakaan terstandar dan pelayanan berbasis digital yang ramah pengguna.	Urusan Perpustakaan
	Penguatan pengawasan kearsipan daerah mengacu pada standar dari ANRI.	Peningkatan pengelolaan kearsipan difokuskan pada peningkatan kearsipan sesuai	Peningkatan nilai hasil pengawasan kearsipan melalui pembinaan dan penerapan sistem	Urusan Kearsipan

https://jdih.pemalangkab.go.id

No.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		standar dan digitalisasi arsip.	pengelolaan arsip yang sesuai standar.	
	Digitalisasi arsip sesuai kebijakan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).	Peningkatan pengelolaan kearsipan difokuskan pada peningkatan kearsipan sesuai standar dan digitalisasi arsip.	Penguatan sarana digitalisasi arsip dan peningkatan SDM pengelola arsip untuk mempercepat transformasi digital pengarsipan.	Urusan Kearsipan
	Peningkatan persentase Perangkat Daerah dengan predikat pengelolaan arsip minimal “B”.	Peningkatan pengelolaan kearsipan difokuskan pada peningkatan kearsipan sesuai standar dan digitalisasi arsip.	Pembinaan dan evaluasi berkelanjutan terhadap perangkat daerah agar mencapai predikat pengelolaan arsip minimal “B”.	Urusan Kearsipan

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, diperlukan penjabaran secara operasional dalam bentuk program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja sebagai tolok ukur pencapaian. Program, kegiatan, dan subkegiatan tersebut disusun untuk dilaksanakan secara bertahap selama periode perencanaan tahun 2025–2029 oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang.

A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   h. Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusuan Dokumen Perencanaan
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
   d. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD
   b. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan perundang undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

https://jdih.pemalangkab.go.id

d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
g. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
i. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
   c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Pembinaan Perpustakaan
1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
   a. Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
   b. Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   c. Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
   d. Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
   e. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Kabupaten/Kota
   f. Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   g. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan

https://jdih.pemalangkab.go.id

h. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik

2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Pemilihan Duta Baca/ Bunda Baca/ Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   b. Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
   c. Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan di Tempat - Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
   d. Sub Kegiatan Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca
   e. Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat

C Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
1. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten / Kota
   a. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan perawatan pelestarian dan pendaftaran naskah kuno
   b. Sub Kegiatan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
2. Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   a. Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
   b. Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara

D Program Pengelolaan Arsip
1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota
   a. Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
   b. Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
   c. Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis
   e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan penawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
   f. Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip
   g. Sub Kegiatan Pembinaan Kearsipan Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota
   a. Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
3. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten / Kota
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN
   b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota

https://jdih.pemalangkab.go.id

E Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

1. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
   a. Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun
2. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
   a. Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan
   b. Pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah kabupaten/kota
3. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten / Kota
   a. Evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana

Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah ke dalam bentuk operasional yang terukur. Setiap program, kegiatan, dan subkegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja dan target capaian yang jelas, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan daerah. Kerangka perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan serta teknik penyusunannya disajikan dalam tabel berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.1
Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Reformasi Birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel	**Meningkatkan kualitas literasi masyarakat dan pengelolaan kearsipan**				**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**		
		Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan			**Indeks Kepuasan Masyarakat**		
			Meningkatnya kualitas akuntabilitas perangkat daerah		**Nilai SAKIP**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupatn/Kota**	
				Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Laporan/Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Tersusunnya Laporan/Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang tersusun**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	
						Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	
						Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	**Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas**	**Sosialisasi Peraturan perundang undangan**	
						Sosialisasi Peraturan perundang undangan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah	**jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah	**Jumlah barang milik daerah yang tersedia**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	**jumlah ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Miik Daerah	**jumlah barang milik daerah yang terpelihara**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan Mebel	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya kualitas perpustakaan dalam pemanfaatan perpustakaan			**Tingkat pemanfaatan perpustakaan**		
			Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan		**Persentase perpustakaan yang terstandarisasi** **Nilai tingkat Kegemaran**	**Program Pembinaan Perpustakaan**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					membaca masyarakat		
				Terlaksananya kegiatan pengelolaan perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah perpustakaan wilayah kabupaten/kota yang dikelola**	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**	
						Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	
						Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	
						Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	
						Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Kabupaten/Kota	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Penyusunan Data dan Indormasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	
						Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	
				Terlaksananya kegiatan pembudayaan gemar membaca	**jumlah kegiatan pembudayaan gemar membaca**	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah**	
						Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	
						Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan di Tempat - Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca	
						Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	
			Meningkatnya kualitas pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno		**jumlah naskah kuno yang ditemukan untuk dilestarikan**	**Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**	
				Terlaksananya kegiatan identifikasi naskah kuno	**Jumlah naskah kuno yang teridentifikasi**	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten / Kota**	
						Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan perawatan pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	
						Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya kegiatan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan	**Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang dikembangkan dan ditemukan**	**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	
						Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	
						Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	
Meningkatkan Reformasi Birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel	**Meningkatkan kualitas literasi masyarakat dan pengelolaan kearsipan**				**Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah**		
		Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah			**Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Predikat Pengelolaan Arsip Minimal B**		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya pengelolaan arsip dinamis , statis dan vital		**Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan**	**Program Pengelolaan Arsip**	
				Terlaksananya kegiatan pengelolaan arsip dinamis	**Jumlah arsip dinamis yang terkelola**	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota**	
						Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	
						Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	
						Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Penyelenggaraan penawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	
						Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	
						Pembinaan Kearsipan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya kegiatan pengelolaan arsip statis daerah	**Jumlah arsip statis yang terkelola**	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota**	
						Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	
				Terlaksananya kegiatan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional	**Jumlah kegiatan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan**	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten / Kota**	
						Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas perlindungan dan penyelamatan arsip		**Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat**	**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	
				Terlaksananya kegiatan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (Sepuluh) tahun	**jumlah arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuliuh) tahun yang dimusnahkan**	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**	
						Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya kegiatan penyelamatan arsip perangakt daerah yangg digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran kecamatan dan desa/kelurahan	**Jumlah arsip yang terselamatkan**	**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah**	
						Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	
						Pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah kabupaten/kota	
				Terlaksananya perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana	**Jumlah arsip yang diselamatkan dari bencana**	**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten / Kota**	
						Evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana	

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.1 Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan

Rencana program, kegiatan, subkegiatan, dan pendanaan merupakan bagian integral dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang yang memuat daftar program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan selama periode lima tahun. Setiap program dan kegiatan disusun berdasarkan tujuan dan sasaran strategis, serta dilengkapi dengan indikator kinerja, target capaian tahunan, dan estimasi kebutuhan anggaran. Rencana program, kegiatan, subkegiatan, dan pendanaan tersebut dijabarkan secara rinci dalam tabel berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.2
Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
			K	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR			14.355	8.502.657.000	13.780	8.792.018.100	14.251	14.037.342.000	14.612	13.254.342.000	14.973	13.250.992.000	15.334	14.647.542.000	
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERPUSTAKAAN			151	8.127.727.500	277	8.244.477.100	397	13.276.842.000	408	12.478.842.000	419	12.459.492.000	430	13.840.042.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	**Nilai SAKIP**	**Nilai**	63,89	3.960.110.500	64,50	5.118.477.100	65,00	7.111.842.000	65,50	7.923.842.000	66,00	8.434.492.000	66,50	9.345.042.000	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				***28.387.410***		***42.235.100***		***47.600.000***		***49.600.000***		***50.250.000***		***50.800.000***	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
			K	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Keluran Kegiatan	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun**	**dokumen**	***10***		***11***		***11***		***11***		***11***		***11***		
Hasil Kegiatan	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang akuntabel**	**%**	**100**		**100**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	4.406.400	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Dokumen	1	3.905.000	1	3.000.000	1	3.200.000	1	3.300.000	1	3.350.000	1	3.500.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
			K	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dokumen RKA-SKPD														
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.705.000	1	3.000.000	1	3.400.000	1	3.800.000	1	4.200.000	1	4.600.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	4.264.600	1	2.000.000	1	3.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Dokumen	1	2.734.910	1	2.735.100	1	3.500.000	1	4.000.000	1	4.200.000	1	4.200.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
			K	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Perubahan DPA-SKPD														
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3.846.500	3	3.500.000	3	4.500.000	3	4.500.000	3	4.500.000	3	4.500.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	5.525.000	1	3.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
			K	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pelaksanaan Forum Perangkat Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusuan Dokumen Perencanaan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				***3.182.985.300***		***3.396.454.000***		***4.399.454.000***		***4.999.454.000***		***5.299.454.000***		***5.999.454.000***	
Keluran Kegiatan	**Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun**	**dokumen**	***2***		***3***		***20***		***20***		***20***		***20***		
Hasil Kegiatan	**persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel**	**%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
			K	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	20/ 14	3.178.783.000	22/14	3.387.454.000	22/14	4.387.454.000	22/14	4.987.454.000	22/14	5.287.454.000	22/14	5.987.454.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	2.842.000	1	3.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Laporan	0	0	1	3.000.000	18	5.000.000	18	5.000.000	18	5.000.000	18	5.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
			K	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Semesteran SKPD														
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1.360.300	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				***0***		***1.500.000***		***1.500.000***		***1.500.000***		***1.500.000***		***1.500.000***	
Keluran Kegiatan	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang tersusun**	**Dokumen**	**0**		**3**		**3**		**3**		**3**		**3**		
Hasil Kegiatan	**Persentase dokumen administrasi Barang Milik Daerah yang**	**%**	**100**		**100**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
			K	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	tersusun secara lengkap dan sesuai ketentuan														
Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				***76.226.962***		***70.000.000***		***250.000.000***		***300.000.000***		***350.000.000***		***400.000.000***	
Keluran Kegiatan	**Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas**	**Orang**	**41**		**40**		**50**		**50**		**50**		**50**		
Hasil Kegiatan	**persentase pegawai yang**	**%**	**100**		**100**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
			K	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	meningkat kapasitasnya														
Sosialisasi Peraturan perundang undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Orang	41	76.226.962	**40**	**70.000.000**	50	250.000.000	50	300.000.000	50	350.000.000	50	400.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah				***184.349.700***		***198.500.000***		***531.500.000***		***591.500.000***		***651.500.000***		***711.500.000***	
Keluran Kegiatan	**jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia**	**layanan**	**8**		**9**		**9**		**9**		**9**		**9**		
Hasil Kegiatan	**Presentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
			K	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	33.000.000	12	10.000.000	12	30.000.000	12	40.000.000	12	50.000.000	12	60.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	12	30.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	16.715.900	12	15.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	41.956.500	12	35.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	6.878.500	12	10.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan	Dokumen	12	3.080.000	12	10.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
			K	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Perundang-undangan	dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan														
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	0	12	5.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	82.718.800	12	82.000.000	12	150.000.000	12	200.000.000	12	250.000.000	12	300.000.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	0	0	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				***12.000.000***		***610.000.000***		***610.000.000***		***610.000.000***		***610.000.000***		***610.000.000***	
Keluran Kegiatan	**Jumlah barang milik daerah yang tersedia**	**unit**	**2**		**18**		**18**		**18**		**18**		**18**		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
			K	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Hasil Kegiatan	**persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	1	530.000.000	1	530.000.000	1	530.000.000	1	530.000.000	1	530.000.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	15	30.000.000	15	30.000.000	15	30.000.000	15	30.000.000	15	30.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	2	12.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				***469.726.128***		***552.788.000***		***791.788.000***		***791.788.000***		***791.788.000***		***791.788.000***	
Keluran Kegiatan	**jumlah ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah**	**jasa**	**3**		**3**		**3**		**3**		**3**		**3**		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
			K	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	daerah yang tersedia														
Hasil Kegiatan	**Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.500.000	12	2.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	124.162.128	12	250.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	Tahun 2027 ada penambahan daya listrik untuk pemasangan lift perpustakaan

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
			K	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	344.064.000	12	300.788.000	12	286.788.000	12	286.788.000	12	286.788.000	12	286.788.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah				***6.435.000***		***247.000.000***		***480.000.000***		***580.000.000***		***680.000.000***		***780.000.000***	
Keluran Kegiatan	**jumlah barang milik daerah yang terpelihara**	**unit**	**34**		**96**		**179**		**179**		**179**		**179**		
Hasil Kegiatan	**Presentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya	Unit	26	6.165.000	25	100.000.000	25	150.000.000	25	200.000.000	25	250.000.000	25	300.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
			K	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit	0	0	20	12.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainya yang Dipelihara	Unit	6	120.000	47	30.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainya yang Dipelihara	Unit	2	150.000	2	100.000.000	2	200.000.000	2	250.000.000	2	300.000.000	2	350.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**Persentase perpustakaan terstandarisasi**		**5,96**	**4.161.937.000**	**12,00**	**2.956.000.000**	**15,00**	**5.935.000.000**	**18,00**	**4.325.000.000**	**20,00**	**3.795.000.000**	**22,00**	**4.265.000.000**	
	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat		**65,25**		**66,65**		**67,90**		**69,15**		**70,00**		**71,25**		
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah				***786.303.200***		***1.131.000.000***		***1.385.000.000***		***1.560.000.000***		***1.835.000.000***		***2.110.000.000***	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
			K	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kabupaten / Kota															
Keluran Kegiatan	**Jumlah perpustakaan wilayah kabupaten/kota yang dikelola**	**unit**	**42**		**88**		**98**		**109**		**120**		**131**		
Hasil Kegiatan	**Presentase perpustakaan tingkat daerah yang terkelola**	**%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	15	15.000.000	15	15.000.000	20	25.000.000	25	35.000.000	30	45.000.000	35	55.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
			K	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Perpustakaan	15	28.510.000	15	50.000.000	16	150.000.000	17	60.000.000	18	70.000.000	19	80.000.000	pada tahun 2027 mengalokasikan anggaran untuk akreditasi perpustakaan umum kabupaten pemalang
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Layanan	4	348.195.000	5	296.000.000	5	350.000.000	5	350.000.000	5	350.000.000	5	350.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
			K	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Umum dan Khusus yang dibina sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	10	9.516.000	56	70.000.000	60	75.000.000	65	80.000.000	70	85.000.000	75	90.000.000	
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan	Orang	120	152.475.000	200	215.000.000	200	250.000.000	200	300.000.000	200	350.000.000	200	400.000.000	
Penyusunan Data dan Indormasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan	Dokumen	5	7.824.500	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
			K	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	2.800	223.282.700	2.000	250.000.000	3000	300.000.000	5000	500.000.000	7000	700.000.000	9000	900.000.000	
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	Perpustakaan	1	1.500.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah				***3.375.633.800***		***1.825.000.000***		***4.550.000.000***		***2.765.000.000***		***1.960.000.000***		***2.155.000.000***	
Keluran Kegiatan	**jumlah kegiatan pembudayaan gemar membaca**	**kegiatan**	**5**		**5**		**5**		**5**		**5**		**5**		
Hasil Kegiatan	**Persentase capaian kegiatan pembudayaan**	**%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
			K	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	gemar membaca														
Pemilihan Duta Baca/ Bunda Baca/ Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/BundaLiterasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	Orang	0	0	15	90.000.000	15	100.000.000	15	120.000.000	15	120.000.000	15	120.000.000	
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Perpustakaan	2	37.365.000	5	105.000.000	10	250.000.000	15	375.000.000	20	500.000.000	25	625.000.000	
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan di Tempat - Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah	Perpustakaan	1	3.168.039.500	1	1.000.000.000	2	3.500.000.000	2	1.500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
			K	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota														
Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang	18	74.729.300	50	430.000.000	50	450.000.000	50	470.000.000	50	490.000.000	50	510.000.000	
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan PendidikanDasar dan Masyarakat	Lokus	1	95.500.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	**Jumlah naskah kuno yang ditemukan untuk dilestarikan**	**naskah**	**4**	**5.680.000**	**2**	**170.000.000**	**2**	**230.000.000**	**2**	**230.000.000**	**2**	**230.000.000**	**2**	**230.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
			K	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten / Kota				***5.680.000***		***90.000.000***		***150.000.000***		***150.000.000***		***150.000.000***		***150.000.000***	
Keluran Kegiatan	**Jumlah naskah kuno yang teridentifikasi**	**eksemplar**	**4**		**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
Hasil Kegiatan	**persentase naskah kuno yang teridentifikasi**	**%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan perawatan pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang	0	0	1	40.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	
Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk	Eksemplar	4	5.680.000	1	50.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
			K	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	dilestarikan dan didayagunakan														
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				***0***		***80.000.000***		***80.000.000***		***80.000.000***		***80.000.000***		***80.000.000***	
Keluran Kegiatan	**Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan**	**eksemplar**	**0**		**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
Hasil Kegiatan	**Persentase koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan**	**%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh perpustakaan	Eksemplar	0	0	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
			K	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	daerah tingkat kabupaten/kota														
Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh perpustakaan daerah tingkat kabupaten/kota	Eksemplar	0	0	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			**14.204**	**374.929.500**	**13.503**	**547.541.000**	**13.854**	**760.500.000**	**14.204**	**775.500.000**	**14.554**	**791.500.000**	**14.904**	**807.500.000**	
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan**	**%**	**67,82**	**349.721.000**	**73,06**	**530.541.000**	**75,68**	**733.500.000**	**78,30**	**743.000.000**	**80,92**	**753.500.000**	**83,54**	**764.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
			K	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan														
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota				***171.510.000***		***382.000.000***		***413.500.000***		***418.000.000***		***423.500.000***		***429.000.000***	
Keluran Kegiatan	**Jumlah arsip dinamis yang terkelola**	**arsip**	**9.200**		**9.000**		**9.150**		**9.300**		**9.450**		**9.600**		
Hasil Kegiatan	**Persentase arsip dinamis yang terkelola**	**%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas	1.200	26.510.000	1.500	25000000 (17.111.600)	1650	27.500.000	1800	30.000.000	1950	32.500.000	2100	35.000.000	
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	8.000	109.600.000	7.500	77.000.000	7500	80.000.000	7500	82.000.000	7500	85.000.000	7500	88.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
			K	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	41	35.400.000	38	45.000.000	38	45.500.000	38	45.500.000	38	45.500.000	38	45.500.000	
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	Unit	0	0	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	
Penyelenggaraan penawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	Lembaga	0	0	38	45.000.000	38	45.500.000	38	45.500.000	38	45.500.000	38	45.500.000	
Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan sadar tertib arsip	Lembaga	0	0	3	40.000.000	3	40.000.000	3	40.000.000	3	40.000.000	3	40.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
			K	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pembinaan Kearsipan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD kabupaten/kota, BUMD kabupaten/kota, ORMAS/ORPOL kabupaten/kota, dan LKD kabupaten/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	Instansi	0	0	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota				***40.000.000***		***40.000.000***		***45.000.000***		***45.000.000***		***45.000.000***		***45.000.000***	
Keluran Kegiatan	**Jumlah arsip statis yang terkelola**	**arsip**	**3.000**		**3.000**		**3.000**		**3.000**		**3.000**		**3.000**		
Hasil Kegiatan	**Persentase arsip statis yang terkelola**	**%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan	Arsip	3.000	40.000.000	3.000	40.000.000	3000	45.000.000	3000	45.000.000	3000	45.000.000	3000	45.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
			K	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Akses Arsip Statis														
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten / Kota				***138.211.000***		***108.541.000***		***275.000.000***		***280.000.000***		***285.000.000***		***290.000.000***	
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten / Kota	**Jumlah kegiatan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan**	**kegiatan**	**2**		**2**		**2**		**2**		**2**		**2**		
Hasil Kegiatan	**persentase kegiatan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan**	**%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan	Pengguna	5	118.151.000	10	23.116.000	20	25.000.000	30	30.000.000	40	35.000.000	50	40.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
			K	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kabupaten/Kota melalui JIKN	Layanan Kearsipan Tingkat daerah kabupaten/Kota Melalui JIKN														
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	20.060.000	2	85.425.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	**Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan,**	**%**	**33,34**	**17.000.000**	**35,0**	**17.000.000**	**36,7**	**27.000.000**	**38,4**	**32.500.000**	**40,1**	**38.000.000**	**41,8**	**43.500.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
			K	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat														
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun				***10.000.000***		***5.000.000***		***10.000.000***		***15.000.000***		***20.000.000***		***25.000.000***	
Keluran Kegiatan	**jumlah arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuliuh) tahun yang dimusnahkan**	**arsip**	**1.500**		**1.000**		**1.200**		**1.400**		**1.600**		**1.800**		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
			K	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Hasil Kegiatan	**Persentase arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuliuh) tahun yang dimusnahkan**	**%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip	1.500	10.000.000	1.000	5.000.000	1200	10.000.000	1400	15.000.000	1600	20.000.000	1800	25.000.000	
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah				***7.000.000***		***5.000.000***		***10.000.000***		***10.000.000***		***10.000.000***		***10.000.000***	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
			K	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kecamatan dan Desa/Kelurahan															
Keluran Kegiatan	**Jumlah arsip perangkat daerah kabupaten/kota yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/desa yang terselamatkan**	**arsip**	**500**		**1**		**2**		**2**		**2**		**2**		
Hasil Kegiatan	**Persentase arsip yang terselamatkan**	**%**	**100**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Arsip yang dilakukan evakuasi, identifikasi, pemulihan dan penyimpanan akibat bencana	arsip	500	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
			K	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, PenyusunanDaftar dan Penilaian serta Penyerahan atau PemusnahanArsipbagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Daftar Arsip	0	0	1	5.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten / Kota				***0***		***7.000.000***		***7.000.000***		***7.500.000***		***8.000.000***		***8.500.000***	
Keluran Kegiatan	**Jumlah arsip yang diselamatkan dari bencana**		**0**		**500**		**500**		**500**		**500**		**500**		
Hasil Kegiatan	**Persentase arsip yang**		**0**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
			K	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	diselamatkan dari bencana														
Evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan evakuasi, identifikasi, pemulihan dan penyimpanan akibat bencana	arsip	0	0	500	7.000.000	500	7.000.000	500	7.500.000	500	8.000.000	500	8.500.000	
PROGRAM PERIZINAN DAN PENGGUNAAN ARSIP	**-**	**-**		**8.208.500**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota				**8.208.500**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
Keluran Kegiatan	**jumlah izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai SOP**	**berkas**	**2**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
			K	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Hasil Kegiatan	**persentase capaian penerbitan izin penggunaan arsip bersifat tertutup dibanding target yang ditentukan pada tahun berkenaan**	**%**	**100**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disusun dan ditetapkan	SOP	2	8.208.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.2 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama, RPJMD, dan Pendanaan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya pembinaan perpustakaan	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**	
			Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	
			Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	
			Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Data dan Indormasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	
			Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	
			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah	
			Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	

https://jdih.pemalangkab.go.id

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan di Tempat - Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca	
			Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Meningkatnya jumlah naskah kuno yang dilestarikan	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten / Kota**	
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan perawatan pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	
			Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	
			Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	
			Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	
3	Program Pengelolaan Arsip	Meningkatnya pengelolaan arsip dinamis, statis dan vital	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota**	
			Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	
			Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	
			Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	
			Penyelenggaraan penawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	
			Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	
			Pembinaan Kearsipan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota	

https://jdih.pemalangkab.go.id

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	
			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten / Kota	
			Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	
			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	
4	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Meningkatnya kualitas perlindungan dan penyelamatan arsip	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**	
			Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun	
			Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah	
			Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	
			Pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah kabupaten/kota	
			Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten / Kota	
			Evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana	

4.3 Uraian Sub Kegiatan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang merupakan ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun secara sistematis berdasarkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. IKU digunakan untuk

https://jdih.pemalangkab.go.id

mengukur capaian kinerja strategis secara menyeluruh, yang mencerminkan hasil utama dari pelaksanaan program dan kebijakan, bukan sekadar aktivitas rutin. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabuoaten Pemalang

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	53	54,4	57,8	60,2	62,6	65	
2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	65,4	66,65	67,9	69,15	70	71,25	
3	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	58,32	60,7	63,08	65,46	67,84	70,22	
4	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Predikat Pengelolaan Arsip Minimal B	%	29,27	34,14	39,02	43,9	48,78	53,65	
6	Nilai SAKIP	Nilai	64	64,5	65	65,5	66	66,5	
7	Indeks Kepusasan Masyarakat	%	85,1	85,3	85,5	85,7	85,9	86,1	

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian pelaksanaan program, kegiatan, atau subkegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang. IKK disusun secara sistematis berdasarkan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra, serta menggambarkan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara lebih teknis dan terukur. Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Indeks	65,4	66,65	67,9	69,15	70	71,25	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	53	55,4	57,8	60,2	62,6	65	
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	70,44	73,06	75,68	78,3	80,92	83,54	
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	16,67	35	36,7	38,4	40,1	41,8	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029 yang telah diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi, serta Renstra Kementerian terkait.

Renstra ini menjadi pedoman resmi dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang. Oleh karena itu, seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang termuat di dalamnya harus dipastikan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan secara berkelanjutan.

Renstra ini berfungsi sebagai acuan strategis yang penting dalam proses penilaian dan pengukuran kinerja perangkat daerah, khususnya dalam mewujudkan tata kelola perpustakaan yang adaptif dan inklusif serta pengelolaan kearsipan yang tertib, akuntabel, dan sesuai standar. Implementasi Renstra ini akan dikawal melalui proses pengendalian dan evaluasi secara berkala yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja dan dasar perbaikan perencanaan di masa yang akan datang.

Keberhasilan pencapaian sasaran dan indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra ini memerlukan komitmen, konsistensi, dan sinergi dari seluruh jajaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta dukungan dari pemangku kepentingan lainnya. Dengan semangat kerja yang profesional, kolaboratif, dan berorientasi hasil, diharapkan seluruh program dan kebijakan yang telah dirancang dapat diimplementasikan secara optimal guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, inklusif, dan berdaya guna di bidang perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Pemalang.

Pemalang, 2025

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pemalang

TANTRI ARI CAHYANINGTYAS, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700322 199403 2 003

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan sub Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah. Situasi tentram, tertib dan nyaman yang diwujudkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang menciptakan keadaan yang kondusif untuk pelaksanaan kegiatan sehari – hari sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar tujuan tersebut dapat tercapai harus didukung oleh perencanaan yang baik sehingga perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu PD harus menyusun Renstra. Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja disamping

https://jdih.pemalangkab.go.id

berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kementrian Dalam Negeri dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Tengah.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Renstra menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dan merupakan tolak ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan pelayanan publik yang baik.

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Satuan Polisi Pamong Praja, dimana kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja harus mendukung kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai.

Proses penyusunan Renstra meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1) Persiapan Penyusunan Renstra PD, terdiri dari pembentukan tim penyusun Renstra PD, orientasi mengenai Renstra PD, agenda kerja tim penyusun Renstra PD, penyiapan data dan informasi; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD; (3) Penyusunan Rancangan Renstra PD; (4) Forum Perangkat Daerah; (5)

https://jdih.pemalangkab.go.id

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD; dan (6) Penetapan Renstra PD.

Tahapan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 disajikan dalam bagan berikut :

Gambar 1.1

Tahapan Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

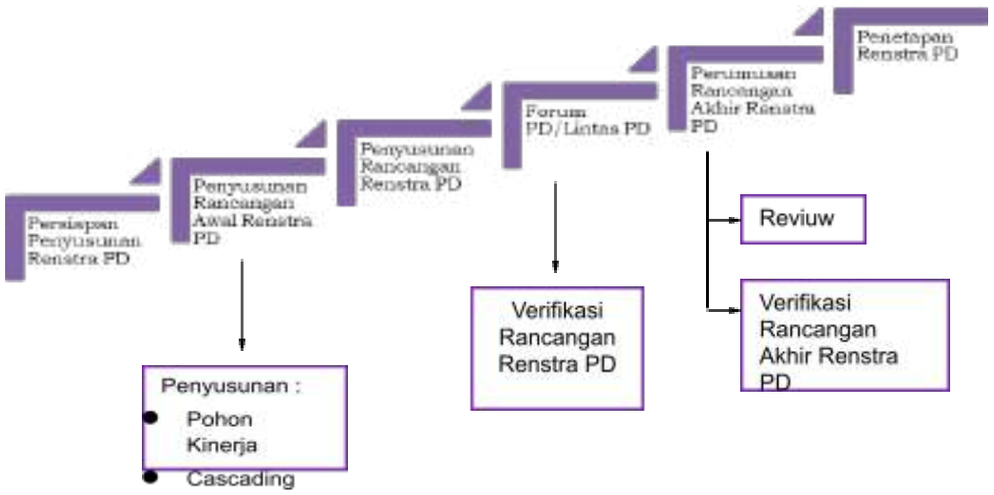

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 ttahun 2025

Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang. Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Gambar 1.2
Keterkaitan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dengan dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang

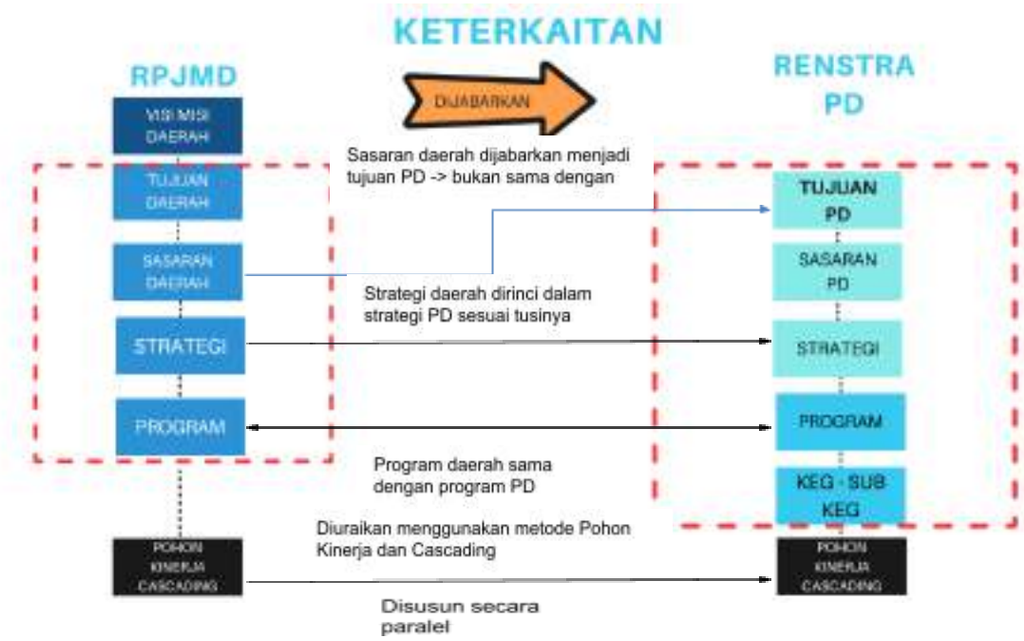

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

https://jdih.pemalangkab.go.id

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 6264);

12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor xx);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor xx Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor xx, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor xx);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor xx Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor xx, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor xx)
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor xxx);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja;
32. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemeritah Kabupaten Pemalang;
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 adalah menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kinerja (Renja) yang bersifat tahunan dan memberikan arah dalam melayani masyarakat sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen aparatur Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah disepakati bersama.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

1. Memberikan arah tujuan , sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029;
2. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
3. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang yang memuat program dan kegiatan.

1.4. **Sistematika Penulisan**

Penyusunan dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan;
2. Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 (dua) subbab yaitu subbab gambaran pelayanan perangkat daerah dan subbab permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
3. Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Berisi tentang Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, Stretegi Perangakat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 dan Arah Kebijakan Perangakat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
4. BAB IV Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, Memuat uraian program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

pagu indikatif, sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah;

5. BAB V Penutup, Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATPOL PP KABUPATEN PEMALANG

2.1 Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP Kabupaten Pemalang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Gambar 2.1

Struktur Organisasi BKPSDMD Kabupaten Pemalang

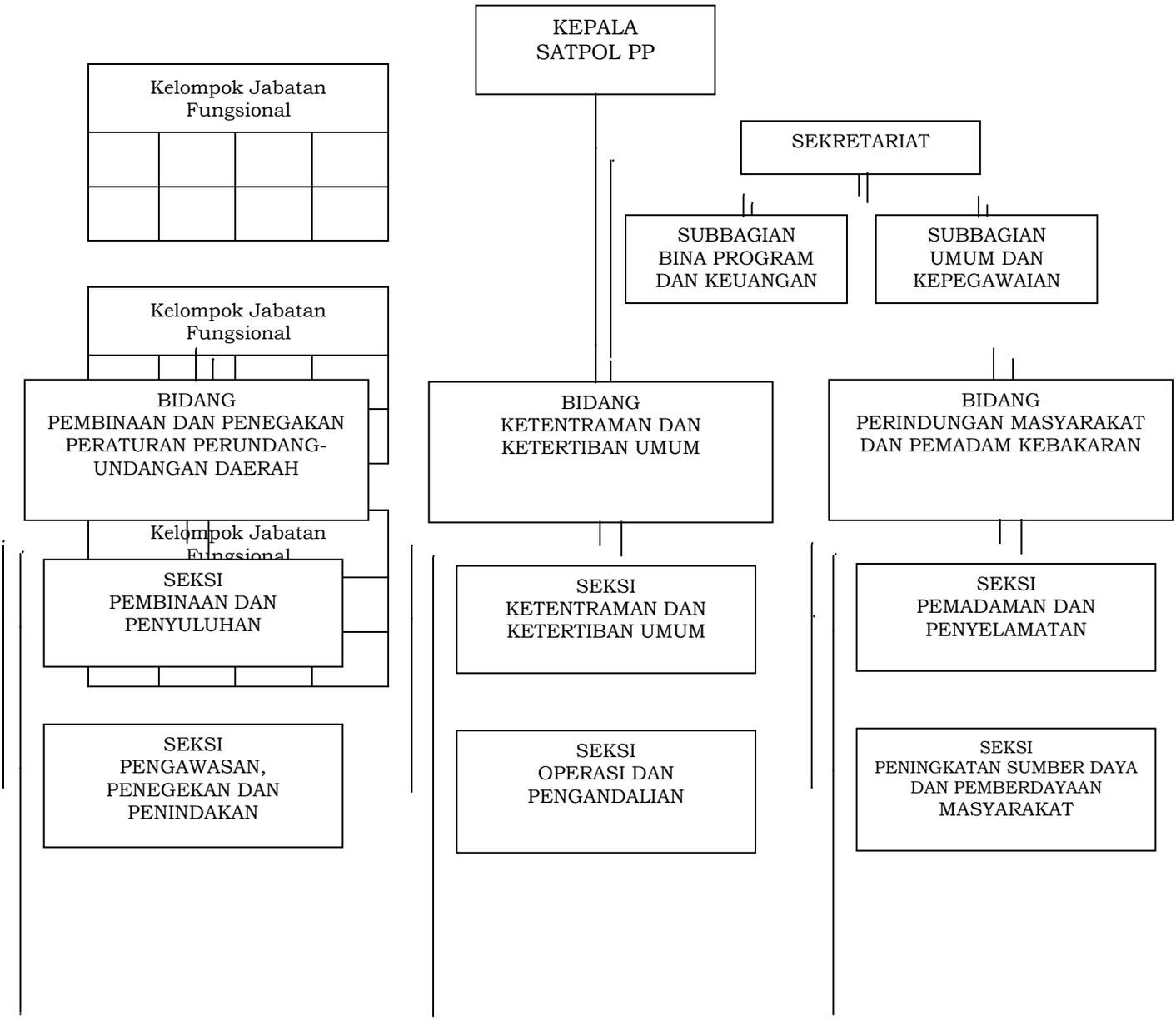

Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang adalah *membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah, serta perlindungan masyarakat, yang meliputi : sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, sub urusan bencana, sub urusan kebakaran dan sub urusan perlindungan masyarakat.*

Untuk melaksanakan tugas pokok, Satpol PP Kabupaten Pemalang menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bapak Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut uraian tugas jabatan structural Satpol PP Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang

1. **Kepala Satuan Polisi Pamong Praja**

   Kepala Satuan mempunyai tugas sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

a. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
b. Merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
c. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai dengan proram dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
d. Mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat agar penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
e. Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai kebutuhan pelayanan publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik;
f. Mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai

https://jdih.pemalangkab.go.id

dengan indikator SPIP dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi;

g. Mengarahkan pengelolaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
h. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
i. Merumuskan inovasi daerah urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat berdasarkan hasil analisa dan atau pemanfaatan teknologi guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
j. Merumuskan laporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2. **Sekretaris;**

Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
b. Mengkoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

c. Menyusun kebijakan kesekretariatan sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
d. Menyelenggarakan program dan kegiatan subbagian bina program dan keuangan serta subbagian umum dan kepegawaian sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
e. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang keterbukaan informasi publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik;
f. menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka pengendalian internal kegiatan;
g. menyusun konsep inovasi kesekretariatan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa untuk efektifitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
h. mengkoordinaskan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang-bidang guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
i. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
j. mengkoordinasian penyusunan laporan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat berdasarkan hasil laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

3. **Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;**

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
b. Menyusun konsep rancangan kebijakan bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. Menyelenggarakan program dan kegiatan seksi operasi dan pengendalian serta seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
d. Menyusun rancangan laporan kegiatan Seksi Operasional dan Pengendalian serta Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagai bahan penilaian kinerja;
e. Menyusun bahan rancangan inovasi bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektifitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
f. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai

https://jdih.pemalangkab.go.id

dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

h. menyusun laporan pelaksanan tugas bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

4. **Kepala Bidang Pembinaan dan Penegakan Perundang-undangan Daerah;**

Kepala Bidang Penegakan Perudang-undangan Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Penegakan Perudang-undangan Daerah sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;

b. Menyusun konsep rancangan kebijakan bidang Penegakan Perudang-undangan Daerah sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. Menyelenggarakan program dan kegiatan seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta seksi penindakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;

d. Menyusun rancangan laporan kegiatan Seksi seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta seksi penindakan sebagai bahan penilaian kinerja;

e. Menyusun rancangan inovasi bidang Penegakan Perudang-undangan Daerah berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektifitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;

f. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keterpaduan pelaksanaan tugas;

https://jdih.pemalangkab.go.id

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan bidang Penegakan Perudang-undangan Daerah sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
h. menyusun laporan pelaksanan tugas bidang Penegakan Perudang-undangan Daerah secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

5. **Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;**

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
b. Menyusun konsep rancangan kebijakan bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. Menyelenggarakan program dan kegiatan seksi satuan perlindungan dan bina potensi masyarakat serta seksi pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
d. Menyusun rancangan laporan kegiatan Seksi satuan perlindungan dan bina potensi masyarakat serta seksi pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagai bahan penilaian kinerja;
e. Menyusun rancangan inovasi bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran berdasarkan

https://jdih.pemalangkab.go.id

identifikasi permasalahan dan analisa guna efektifitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;

f. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keterpaduan pelaksanaan tugas;

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

h. menyusun laporan pelaksanan tugas bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2.1.2 **Sumberdaya Perangkat Daerah**

Sumber daya Satpol PP Kabupaten Pemalang yang meliputi sumber daya manusia/kepegawaian dan sarana prasarana sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

1. Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Jumlah pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyakatan sosial tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.
Pegawai Satpol PP Kabupaten Pemalang

No	Uraian	L	P	Golongan				Jumlah
				I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas	1	-	-	1	-	-	1
2	Sekretaris	1	-	-	-	1	-	1
3	Kabid	2	1	-	-	3	-	3
4	Kasi/ Kasubag	5	-			-	5	5
5	JFU	71	10	-	51	30		81
6	JFT	5	4	-	4	1	-	9
7	Non ASN	124	15	139				139
Jumlah ASN dan Non ASN		**209**	**30**	**139**	**56**	**35**	**5**	**239**

Sumber : Sekretariat Satpol PP Kab. Pemalang 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

Berdasarkan tabel 2.1, jumlah pegawai golongan IV berjumlah 5 (lima) orang. Jumlah pegawai golongan III berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang. Jumlah pegawai golongan II sebanyak 56 (lima puluh enam) orang, golongan I sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja dominan pegawai Non ASN sebanyak 58,15%. Hal ini terjadi karena untuk mencukupi kebutuhan pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak dapat dicukupi dari pegawai ASN.

Berdasarkan gender atau jenis kelamin, jumlah pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja jenis kelamin laki-laki sebanyak 209 (dua ratus sembilan) orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 30 (tiga puluh) orang. Dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin belum seimbang secara gender karena menyesuaikan tugas lapangan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel 2.2.

Data Pegawai Berdasar Diklat Kepemimpinan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Diklatpim II	-	-	-
2	Diklatpim III	1	1	-
3	Diklatpim IV	5	4	1
6	Struktural yang belum diklat	6	3	3
Jumlah		12	8	4

Sumber : Sekretariat Satpol PP Kab. Pemalang 2025

Berdasarkan tabel 2.2, data pegawai yang telah melaksanakan Diklatpim II tidak ada. Pegawai yang telah melaksanakan Diklatpim III sebanyak 1 (satu) orang, dengan jenis kelamin laki-laki. Pegawai yang telah melaksanakan Diklatpim IV sebanyak 5 (lima) orang, dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 4 (empat) orang, perempuan berjumlah 1 (satu) orang. Sedangkan ada sejumlah 6 (enam) orang pejabat struktural yang belum melaksanaan diklat, yaitu Diklatpim III sejumlah 1 (satu) orang, Diklatpim IV sejumlah 6 (enam) orang.

Tabel 2.3.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pasca Sarjana (S2)	4	3	1
2	Sarjana (S1)	39	33	6
3	Diploma	10	7	3
4	SLTA/paket C	185	170	15
5	SLTP/paket B	1	1	-
6	SD	-	-	-
Jumlah		239	179	29

Sumber : Sekretariat Satpol PP Kab. Pemalang 2025

Berdasarkan tabel 2.3 dapat dilihat bahwa pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang yang berpendidikan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 4 orang, dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 3 (tiga) orang, jenis kelamin perempuan berjumlah 1 (satu) orang. Pegawai yang berpendidikan Sarjana (S1) berjumlah 39 orang, dengan jenis kelamin laki-laki 33 (tigapuluh tiga) orang, perempuan 6 (enam) orang. Pegawai yang berpendidikan Diploma sebanyak 10 (sepuluh) orang, dengan jenis kelamin perempuan 3 (tiga) orang, laki-laki 7 (tujuh) orang. Pegawai yang berpendidikan SLTA/paket C sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) orang, dengan jumlah laki-laki sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) orang, perempuan 15 (lima belas) orang. Pegawai dengan pendidikan SLTP/paket B sebanyak 1 (satu) orang, dengan jenis kelamin laki-laki 1 (satu) orang, jenis kelamin perempuan tidak ada. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang dominan berpendidikan SLTA yaitu sebanyak 77,4 %.

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang, tidak terlepas dari kualitas dan kuantitas sumber daya manusia karena ini adalah tulang punggung yang menentukan berhasil tidaknya suatu program dan kegiatan.

Tabel 2.4.

Data Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	IIA	4	4	-
2	IIB	2	2	-
3	IIC	2	2	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

4	IID	12	12	-
5	IIIA	16	15	1
6	IIIB	5	4	1
7	IIID	6	6	-
8	IVA	3	2	1
9	IVB	1	1	-
10	IVC	1	1	-
Jumlah		52	49	3

Sumber : Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja, 2021

Berdasarkan tabel 2.4, data pegawai berdasarkan tingkat golongan, Golongan IIA, sebanyak 4 (empat) orang, dengan jenis kelamin laki-laki. Pegawai dengan eselon IIIB, sebanyak 2 orang dengan jenis kelamin laki – laki dan eselon IVA sebanyak 9 (sembilan) orang dengan 5 orang laki – laki dan 4 orang perempuan. Dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan tingkat eselon dominan laki – laki yaitu sebanyak 66,67 %.

1. Sarana dan Prasarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5.

Inventaris Aset Satuan Polisi Pamong Praja

No	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
1	01		Tanah			
		01	Tanah	595 m2	892.500.000	
			Jumlah KIB A		*892.500.000*	
2	01		Peralatan dan Mesin			
		02	Alat-alat Besar	3	10.000.000	
		03	Alat-alat Angkutan	33	6.061.956.223	
		04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	6	6.000.000	
		05	Alat Pertanian	1	8.339.000	
		06	Alat Kantor & Rumah Tangga	321	873.101.472	
		07	Alat Studio & Alat Komunikasi	39	120.566.560	
		08	Alat-alat Kedokteran	6	12.891.060	
		09	Alat Laboratorium	0	0	
		10	Alat-alat persenjataan/keamanan	20	12.000.000	
			Jumlah KIB B		*7.104.854.315*	
3	03		Gedung dan Bangunan			
		11	Bangunan Gedung	637.6	756.590.000	
		12	Monumen		0	
			Jumlah KIB C		*756.590.000*	

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
4	04		Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	
		13	Jalan & Jembatan	0	0	
		14	Bangunan Air/Irigasi	0	0	
		15	Instalasi	0	0	
		16	Jaringan		0	
			Jumlah KIB D		*0*	
5	05		Aset Tetap Lainnya			
		17	Buku dan Perpustakaan	28	1.040.000	
		18	Barang Bercorak Kebudayaan	83	230.960.000	
		19	Hewan, Ternak dan Tanaman			
			Jumlah KIB E		*232.000.000*	
6	06		Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	
			Jumlah KIB F		*0*	

Sumber : Kartu Inventaris Barang (KIB) Satuan Polisi Pamong Praja,

b. **Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja**

Gambaran kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020-2024 diperoleh dari dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.7 dan Tabel 2.8 berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wiilayah	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum	Presentase adanya gangguan ketentramn dan ketertiban umum	NA	NA	98	96	94	97,43	100	100	100	58	100	100	102	104	61,7
			Presentase kawasan patuh ketentraman dan ketertiban umum	NA	NA	7,14	7,14	7,14	NA	7,14	7,14	14,29	14,29	NA	100	100	200	200
		Meningkatnya pelayanan kinerja Satpol PP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja Satpol PP	82,89	83,89	84,89	85,89	86,89	82,89	82,32	84,89	85,89	86,89	100	98	100	100	100
4	Meningkatkan kualitas penanganan kebakaran	-	Rasio kejadian kebakaran	90	88	86	84	82	50	58	63	60	35,3	55,55	65,9	73,25	71,42	43,04
5		Meningkatnya kualitas penanangan kebakaran	Cakupan Pelayanan Kebakaran	20	25	30	35	40	50	58	63	20	20	250	232	210	71,42	50

Berdasarkan tabel 2.7.a diatas, rata-rata semua target terpenuhi. Karena adanya dedikasi dan dukungan semua anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang. Sedangkan target indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu pada indikator rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, pada tahun 2019 sebesar 34,8% dan pada tahun 2020 sebesar 24,8%. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan pengertian/definisi, dimana yang masuk dalam hitungan adalah anggota Polisi Pamong Praja yang bertugas di lapangan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang
Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi pada tahun					rasio antara realisasi dan anggaran					rata-rata pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	2.483.968.000	2.958.199.570	11.342.796.000	11.082.540.000	11.617.550.400	2.483.968.000	2.958.199.570	10.985.107.819	10.849.366.499	`11.005.173.825	100	100	96,61	97,90	94,73		
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.920.387.000	1.511.757.592	1.665.000.000	1.506.769.000	1.842.494.000	3.790.051.463	1.511.757.592	1.664.825.654	1.505.961.500	1.841.576.900	96,67	100	99,99	99,95	99,95		
Program Pencegahan, Penanggualangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	703.900.000	585.647.059	242.500.000	214.375.000	1.062.500.000	703.701.596	585.647.059	242.500.000	214.119.368	1.036.389.434	99,97	100	100	99,98	97,54		

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran rata-rata baik, hal ini dikarenakan adanya kerjasama di semua bidang dalam melaksanakan program/kegiatan yang telah direncanakan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

c. **Kelompok Sasaran Layanan Satpol PP Kabupaten Pemalang**

Sasaran layanan Satpol PP Kabupaten Pemalang adalah masyarakat Kabupaten Pemalang sejumlah 1.541.685 penduduk, yang terdiri dari atas 780.921 laki-laki dan 760.764 perempuan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Kabupaten Pemalang

Laki-Laki	Perempuan	Total
780.921	760.764	1.541.685

S*umber : BPS Kabupaten Pemalang, 2025*

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan atau kesenjangan antara yang diharapkan dan yang nyata terjadi. Pemetaan permasalahan pelayanan Satpol PP Kabupaten Pemalang dilakukan dengan menyusun pohon masalah dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.10

Pemetaan Permasalahan Satpol PP Kabupaten Pemalang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya gangguan tantibum yang diselesaikan	Masih banyak masyarakat yang melanggar ketentraman dan ketertiban umum	Belum optimalnya Kegiatan pencegahan gangguan trantibum
			Belum optimalnya penindakan atas gangguan trantibum
			Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan trantibumlinmas
			Kurangnya pemberdayaan linmas
			Masih rendahnya kualitas SDM yang kompeten
			Perlunya koordinasi dengan lintas sektor

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Masih kurangnya sarpras trantibum
			Belum ada SOP trantibum sesuai kebutuhan
			Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkada merupakan amanat SPM
			Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat thd Perda/Perkada yang berlaku masih rendah
			Tingkat kesadaran masyarakat thd Perda/Perkada yag masih rendah
			Belum optimalnya penanganan pelanggaran Perda/Perkada
			Belum optimalnya kinerja PPNS dalam penanganan pelanggaran Perda/Perkada
	Belum optimalnya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Belum optimalnya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Masih rendahnya disiplin dan pola hidup masyarakat dalam pemahaman yg berkaitan dg tindakan yg mengarah pencegahan kebakaran
			Belum optimalnya pemadaman dan pengendalian kebakaran yang terjadi
			Belum optimalnya penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran
			Terbatasnya SDM aparatur pemadam dalam penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Belum adanya sarpras pencegahan,

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			penanggulangan kebakaran dan APD yang terstandarisasi
			Masih kurangnya sarpras pencegahan, penanggulangan kebakaran dan APD yang tersedia (termasuk didalamnya pos pemadam kebakaran)
			Masih terbatasnya SDM/aparatur pemadam kebakaran yang sesuai kualifikasi yang dibutuhkan
			Belum optimalnya kerjasama antar daerah perbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran
		Masih kurangnya peralatan proteksi kebakaran yang layak pakai	Belum adanya kesadaran instansi/lembaga/tempat usaha/perusahaan untuk menyediakan alat proteksi kebakaran
			Belum terpenuhinya kebutuhan sarpras kebakaran yang sesuai standar
		Belum memiliki SDM aparatur pemadam kebakaran untuk melakukan invetigasi penyebab kebakaran	Belum optimalnya pelaksanaan investigasi penyebab kebakaran
		Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap penanganan dan penanggulangan kebakaran
			Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam urusan penanganan kebakaran
			Masih kurangnya dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana

2.2.2 Isu Strategis

Berdasar Permendagri 86 Tahun 2017, isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berlangsung dalam jangka menengah/panjang. Isu strategis Satpol PP Kabupaten Pemalang dirumuskan dengan memperhatikan potensi dan permasalahan serta mempertimbangkan isu KLHS, isu strategis global, nasional, dan regional.

Berdasar hasil analisa isu strategis daerah sebagaimana tertuang dalam Bab IV Dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 tentang Analisis Isu-Isu Strategis, maka diperoleh kesimpulan permasalahan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yaitu isu kondusivitas dan stabilitas daerah. Hal ini didapatkan masalah pokok yaitu merujuk pada isu mengenai derajat keamanan, kondisi daerah yang tertib dan demokratis mendukung stabilitas ekonomi dan daya tarik investasi.

Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu masih rendahnya penegakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman serta memiliki kepedulian sosial dan bermartabat. Hal ini terjadi karena masih adanya unjuk rasa dan kejadian insidentil yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, masih kurang dan belum optimalnya personil Linmas yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan masih lemahnya penyelesaian pelanggaran perda.

Hasil identifikasi selain tersebut diatas, juga didapatkan hasil kajian yaitu masih rendahnya pelayanan penanganan kebakaran. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya sarana pemadam kebakaran

https://jdih.pemalangkab.go.id

baik berupa mobil pemadam kebakaran maupun alat pemadam api ringan (APAR). Penyebab yang lain dikarenakan rasio SDM petugas pemadam kebakaran yang memenuhi standar (lulus kompetensi sebagai petugas pemadam kebakaran) masih rendah. Sedangkan permasalahan umum yang sering terjadi akibat kebakaran yaitu masih rendahnya bangunan publik yang memenuhi standar penanganan kebakaran, dimana salah satu indikasinya adalah minimnya bangunan publik yang sudah memiliki APAR.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Satpol PP Kab. Pemalang Tahun 2025-2029

Satpol PP Kabupaten Pemalang dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan mampu bersaing di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, maka BKPSDMD Kabupaten Pemalang harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan komprehensif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran, Satpol PP Kabupaten Pemalang secara proaktif berperan dalam meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, dan meningkatkan pelayanan kebakaran.

Tujuan Renstra Satpol PP Kabupaten Pemalang harus berdasar pada sasaran Daerah yang termuat dalam RPJMD. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah : **“PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA”**. Visi ini memiliki pembentuk kata :

1. **Bersih** : Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan.
2. **Cakap** : dimaknai memiliki sumber daya manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan

https://jdih.pemalangkab.go.id

memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.

3. **Handal** : dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.
4. **Mulya** : Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. Resik: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih.

   Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik.
2. Hijau: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sector unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau, yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan) yang ramah lingkungan, industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat

https://jdih.pemalangkab.go.id

mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM dimasyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.

3. Apik: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penaatan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dari Desa.
4. Peduli: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi.
5. Silaturahmi: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong,tepa selira dan sejahtera.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, dan saling menghormati dan teposliro.
6. Organisatoris: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan Good Governance, Clean Governance dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.
7. Digitalisasi: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi.

https://jdih.pemalangkab.go.id

8. Ikhlas: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkan kearifan dan budaya lokal.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang tersebut, Satpol PP Kabupaten Pemalang mendukung visi **Handal** dan misi **Silaturahmi** yaitu **meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong,tepa selira dan sejahtera.**

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja selama tahun 2025-2029 adalah **"Penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban serta Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran".** Sesuia dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang merumuskan kebijakan, pelaksaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan admnistrasi dinas serta pelaksanaan fungsi lain yang diberkan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya. Tujuan tersebut diukur dengan indikator *Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban,* yang merupakan jumlah kasus (n-1) – jumlah kasus (n) **dibagi** jumlah kasus (n) **dikali** 100% *serta Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran* diukur dengan jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di Kabupaten/Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di Kabupaten/Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembonaan dibagi jumlah kejadian kebakaran dikali 100%

3.2 Sasaran Renstra Satpol PP Kab. Pemalang Tahun 2025-2029

https://jdih.pemalangkab.go.id

Untuk mencapai tujuan Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Pelayanan Kebakaran, Satpol PP Kabupaten Pemalang mempunyai 3 (tiga) sasaran jangka menengah yang akan akan dicapai selama tahun 2025-2029, yaitu :

1. Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah, yang diukur dengan indikator Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan yang merupakan hasil dari “Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan DIBAGI Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi DIKALI 100%”
2. Meningkatnya Penanganan Kebakaran, yang diukur dengan indikator Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran yang merupakan hasil dari “Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran (15 menit)”
3. “Meningkatnya akuntabilitas kinerja” yang diukur dengan indikator nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan hasil penilaian dari Inspektorat Kabupaten Pemalang. Peningkatan akuntabilitas kinerja adalah salah satu langkah penting untuk mewujudkan meritokrasi. Dengan adanya pertanggungjawaban kinerja yang jelas, sistem meritokrasi akan dapat berjalan dengan lebih baik dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan kompetitif.
4. “Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan” yang diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan hasil survei kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi kepegawaian yang telah dilaksanakan. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian merupakan langkah penting untuk mewujudkan meritokrasi. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, maka sistem merit dapat diterapkan secara lebih efektif.

Keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra Satpol PP Kabupaten Pemalang dapat digambarkan sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

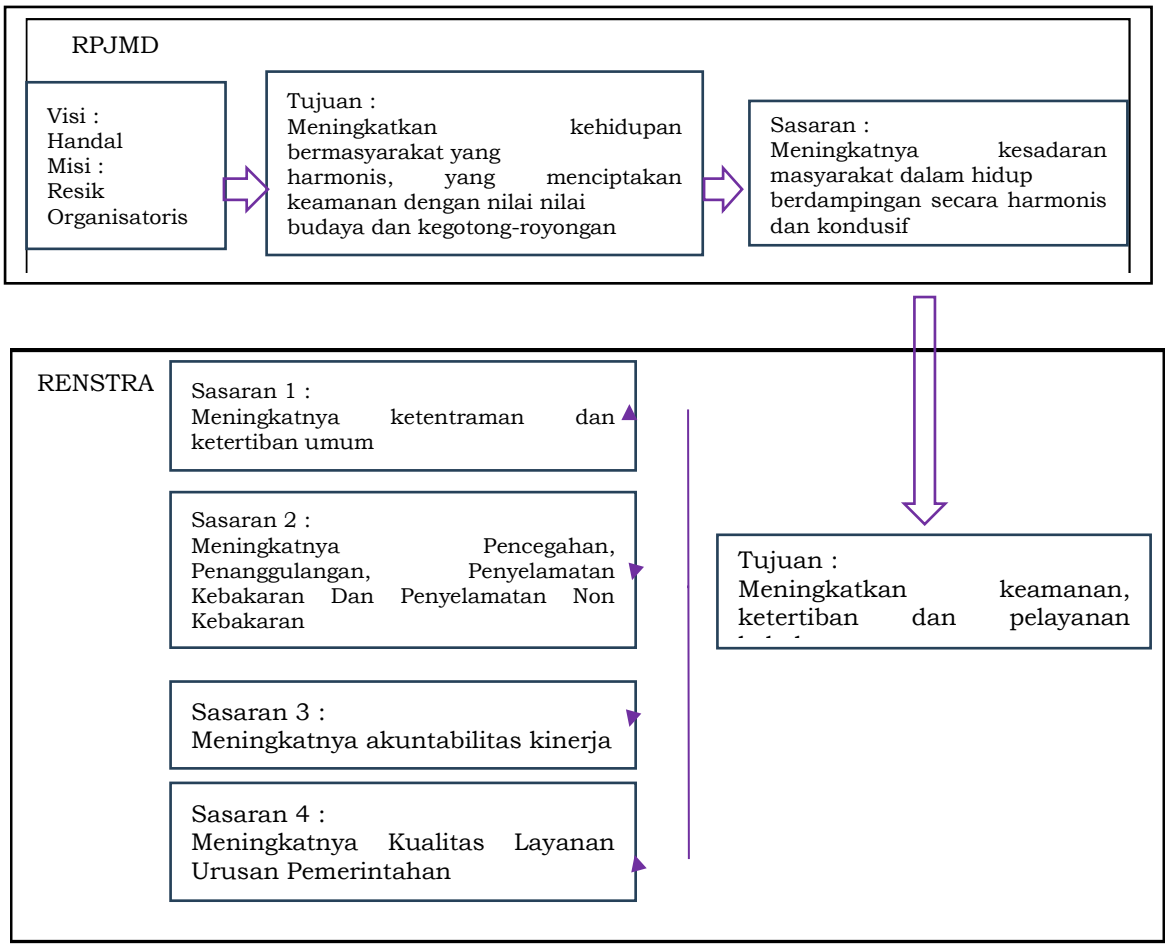

Selanjutnya rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP Kabupaten Pemalang dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	14
Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, yang menciptakan keamanan dengan nilai nilai budaya dan kegotong-royongan			Angka Kriminalitas	Angka	NA	97							
	Meningkatkan keamanan, ketertiban dan pelayanan kebakaran		Presentase Penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Jumlah Warga Negara Yang memperoleh	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

https://jdih.pemalangkab.go.id

			Layanan Akibat dari penegakan hukum perda dan perkada										
		Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Presentase Penanganan kasus kebakaran	%	60	35,3	36	37	38	39	40	41	41
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	Nilai	61,9	63,82	64,82	65,82	66,82	67,82	68,82	69,82	70,82
		Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84,41	84,78	85,28	85,78	86,28	86,78	87,28	87,78	87,78

https://jdih.pemalangkab.go.id

3.3 Strategi Satpol PP Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Satpol PP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Strategi adalah langkah-langkah berisikan progam-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Satuan Polisi Pamong Praja mencakup penentuan kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh Pemerintah Daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara/langkah demi langkah yang dilakuan organisasi dalam mencapai tujuan–tujuan dan sasaran–sasaran perencanaan strategisnya. Strategi yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum difokuskan pada pelaksanaan pelayanan yang HUMANIS dan sesuai SPM
b. Meningkatkan kualitas pelayanan kinerja Satpol PP difokuskan pada peningkatan akuntabilitas kinerja
c. Meningkatkan pelayanan kebakaran dan non kebakaran difokuskan pada peningkatan jangkauan pelayanan kebakaran dan penanganan kedaruratan non kebakaran.

3.4 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan–ketentuan yang telah disepakati pihak–pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap Program,

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kegiatan dan Sub Kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah Strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja menunjukan bagaimana cara Satuan Polisi Pamong Praja mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum melalui operasi keamanan, ketentraman dan ketertiban umum; melalui operasi rutin, penegakkan perda / perbup; melalui operasi yustisi, menyediakan sarana dan prasarana serta mengembangkan kapasitas PPNS di Kabupaten Pemalang.
b. Pelaksanaan akuntabilitas kinerja melalui penyusunan perencanaan dan pelaporan yang berkualitas, serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan BMD dengan baik dan benar.
c. Penyelenggaraan pelayanan kebakaran melalui peningkatan jumlah WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran), meningkatkan SDM dan sarana prasarana, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat serta membentuk dan memberdayakan relawan kebakaran.

Tabel 3.4

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Visi : Pemalang Bercahaya – Bersih, Cakap, Handal, Mulya				
Misi : Resik, Hijau, Apik, Peduli, Silaturahmi, Organisatoris, Digitalisasi, Ikhlas				
-	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penurunan gangguan keamanan dan ketertiban	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum difokuskan pada pelaksanaan pelayanan yang HUMANIS dan sesuai SPM	Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum melalui operasi keamanan, ketentraman dan ketertiban umum; melalui operasi rutin, penegakkan perda / perbup; melalui operasi yustisi, menyediakan sarana dan prasarana serta mengembangkan kapasitas PPNS di Kabupaten Pemalang
			Meningkatkan kualitas pelayanan kinerja Satpol PP difokuskan pada	Pelaksanaan akuntabilitas kinerja melalui penyusunan perencanaan dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Visi : Pemalang Bercahaya – Bersih, Cakap, Handal, Mulya				
Misi : Resik, Hijau, Apik, Peduli, Silaturahmi, Organisatoris, Digitalisasi, Ikhlas				
-	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			peningkatan akuntabilitas kinerja	pelaporan yang berkualitas, serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan BMD dengan baik dan benar
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Meningkatkan pelayanan kebakaran dan non kebakaran difokuskan pada peningkatan jangkauan pelayanan kebakaran dan penanganan kedaruratan non kebakaran sesuai dengan SPM	Penyelenggaraan pelayanan kebakaran melalui peningkatan kapasitas WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran), meningkatkan SDM dan sarana prasarana, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat serta membentuk dan memberdayakan relawan kebakaran

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Pemalang terpilih tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 serta sesuai dengan tugas dan fungsinya maka rencana program dan kegiatan yang ditetapkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Berdasarkan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Pemalang serta sasaran RPJMD, ditetapkanlah tujuan Renstra. Selanjutnya dirumuskan sasaran Renstra dalam upaya pencapaian tujuan tersebut. Agar sasaran Renstra dapat dicapai, dirumuskanlah hasil kinerja berupa outcome yang merupakan kinerja dari program yang selanjutnya dijabarkan dalam kinerja kegiatan dan sub kegiatan. Kerangka perumusan program/kegiatan/sub kegiatan Renstra Satpol PP Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada gambar berikut :

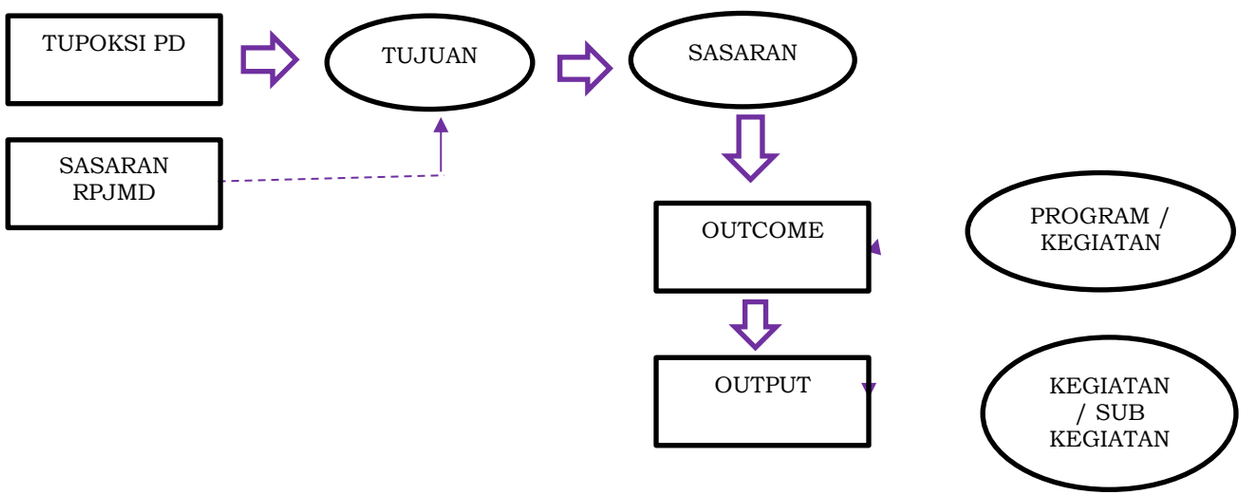

Gambar 4.1
Kerangka Penyusunan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Renstra Satpol PP Kabupaten Pemalang

Selanjutnya, perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Satpol PP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.1
Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Satpol PP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hidup berdampingan secara harmonis dan kondusif							
	Meningkatkan keamanan, ketertiban dan pelayanan kebakaran						
		Meningkatnya penegakan Perda			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum		Presentase penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban umum	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Kab/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan	Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					perlindungan masyarakat tingkat Kab/Kota		
				Terlaksananya pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan kertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan kertiban umum	Sub Kegiatan Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban Umum	
				Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	
				Terlaksananya kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antara lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Penyusunan SOP Keteriban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah dokumen SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang telah di buat dan dimutakhirkan	Sub Kegiatan Penyusunan SOP Keteriban umum dan ketentraman masyarakat	
				Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban	Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan penanganan unjuk rasa	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	dan kerusuhan masa yang dilakukan penindakan	Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
				Terlaksananya Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah laporan penyediaan layanan dampak penegakan Perda dan Perkada yang terlayanijumalah laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga layanan yang terdampak penegakan perda dan pekada yang terlayani	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	
			Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah Perda atau Perbup yang di tegakkan	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
				Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakkan Peraturan daerah dan peraturan kepada daerah	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
				Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran pertauran daerah dan peraturan kepala daerah sesuai SOP	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
				Terlaksananya Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah	Sub Kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					dan peraturan Bupati/Wali kota		
				Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah polisi pamong praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS(Satuan Polisi Pamong Praja)	Jumlah laporan hasil pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS penegakan Perda	Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS(Satuan Polisi Pamong Praja)	
		Meningkatnya Penanganan Kebakaran			Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran		
			Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		Prosentase pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban kebakaran : Prosentase pembentukan Relawan Pemadam kebakaran di Desa/kelurahan	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
			Meningkatnya penanganan kebakaran		Jumlah kejadian kebakaran dan non kebakaran yang di tangani	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen NSPM pencegahan/penanggulangan kebakaran dalam daerah Kab/Kota setiap Tahunnya	Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejadin kebakaran yang di padamkan dan di kendalikan	Sub kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapansiagaan petugas piket dan penyelamatan/Evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
				Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparatur pemaam kebakaran yang memiliki sertifikasi ketrampilan teknis dan analis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	jumlah dokumen hasil penyelnggaraan kerja sama dan koordinasi antar wilayah kabupaten /kota dalam pencegahan,penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Sub kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
				Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasana Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perilindungan	Jumlah Sarana dan Prasana Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perlindungan	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasana Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perilindungan	
			Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan		Jumlah desa yang mempunyai Relawan Kebakaran	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			dan Penyelamatan Kebakaran			Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaan setiap tahunnya	Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
				Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah desa/kel yang terbentuk dan terbina relawan Pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) tiap tahunnya	Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	
				Terlaksananya Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah dokumen yang memuat jumlah SKKL Desa/Klurahan yang telah tersedia dukungan sapras Damkar	Sub kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja			Nilai SAKIP		
			Meningkatnya kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja		Nilai SAKIP dan Nilai IRB	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penysunan dokumen perubahan RKA SKPD	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersedianya laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya laporan keuangan Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
				Tersedianya dokumen Pelaporan dan Analis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analis Prognosis Realisasi Anggaran	Sub kegiatan Penyusunan laporan dan Analis Prognosis Realisasi Anggran	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan			Indeks Kepuasan Masyarakat		
			Meningkatnya tindak lanjut atas		Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti setiap layanan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			rekomendasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat				
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawau berdasarkan tugas dan fungsi	pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguan Kantor	
				Terlaksananya penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah paket administrasi umum yang tersedia	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Sub kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	
				Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana gedung kantor lainya yang di pelihara/Rehabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung atau bangunan lainnya	

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan target serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif untuk BKPSDMD Kabupaten Pemalang selama tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Satpol PP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline		Target dan Pagu Indikatif												Ket
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	Target	Rp	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
TUJUAN Meningkatkan keamanan, ketertiban dan pelayanan kebakaran		Presentase Penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban umum	Nilai															
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran																
SASARAN 1 Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan																
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Persen	100	1.841.576.900	173	1.034.594.650	173	418.500.000	173	507.000.000	173	546.500.000	176	566.000.000	176	673.000.000	
Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantib yang ditangani	Kasus	117	1.189.542.900	159	481.585.450	159	268.500.000	159	337.000.000	160	366.500.000	160	374.000.000	160	428.000.000	
Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman &	Terlaksananya pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi	Dokumen	16	588.160.000	6	36.379.850	6	37.125.000	6	40.000.000	6	42.000.000	6	45.000.000	6	50.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline		Target dan Pagu Indikatif												Ket
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	Target	Rp	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Kab/Kota	penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Kab/Kota																
Sub Kegiatan Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban Umum	Terlaksananya pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan kertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan kertiban umum	Dokumen	2	75.000.000	2	70.948.800	2	81.375.000	2	85.000.000	2	87.000.000	2	90.000.000	2	100.000.000	
Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya	Orang	40	100.000.000	40	28.804.000	40	30.000.000	40	32.000.000	40	35.000.000	40	40.000.000	40	50.000.000	
Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antara lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	5	210.000.000	3	15.810.200	3	8.658.000	3	10.000.000	3	12.500.000	3	15.000.000	3	25.000.000	
Sub Kegiatan Penyusunan SOP Keteriban umum dan ketentraman masyarakat	Terlaksananya Penyusunan SOP Keteriban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah dokumen SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang telah di buat dan dimutakhirkan	Dokumen	2	1.500.000	1	1.450.200	1	1.530.000	1	2.000.0000	2	2.500.0000	2	3.000.000	2	3.000.000	
Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,Pengamanan dan Pengawalan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegh dini,pembinaan dan penyuluhan,patroli,pengamanan dan pengawalan	laporan	100	180.000.000	92	262.710.000	92	129.396.000	92	130.000.000	92	135.000.000	95	140.000.000	95	150.000.000	
Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa yang dilakukan penindakan	laporan	10	25.000.000	10	21.514.000	10	8.658.000	10	10.000.000	10	15.000.000	10	20.000.000	10	25.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Terlaksananya Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah laporan penyediaan layanan dampak penegakan Perda dan Perkada yang terlayanijumalah laporan pemberian pelayanan dasar	Laporan	5	10.000.000	5	44.013.400	5	1.758.000	5	10.000.000	5	15.000.000	5	21.000.000	5	25.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline		Target dan Pagu Indikatif												Ket
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	Target	Rp	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		kepada warga layanan yang terdampak penegakan perda dan pekada yang terlayani																
Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah Perda atau Perbup yang di tegakkan	Peraturan	19	643.534.000	13	552.270.000	13	140.000.000	13	160.000.000	13	180.000.000	13	192.000.000	14	245.000.000	
Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakkan Peraturan daerah dan peraturan kepada daerah	Laporan	8	130.000.000	1	112.102.000	1	40.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	
Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran pertauran daerah dan peraturan kepala daerah sesuai SOP	Laporan	225	443.579.500	2	397.419.600	2	40.000.000	2	45.000.000	2	50.000.000	2	55.000.000	2	60.000.000	
Sub Kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali kota	Laporan	12	69.954.500	10	42.748.400	10	60.000.000	10	65.000.000	10	70.000.000	10	72.000.000	10	75.000.000	
Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya	Laporan	1	8.500.000	1	739.200	1	10.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	2	20.000.000	
Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS(Satuan Polisi Pamong Praja)	Jumlah laporan hasil pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS penegakan Perda	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada	Laporan	1	8.500.000	1	739.200	1	10.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	2	20.000.000	
SASARAN 2 Meningkatnya Penanganan Kebakaran		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran																
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Prosentase pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban kebakaran :	Persen	112	1.036.389.434	1516	611.641.100	1516	650.000.000	1520	671.000.000	1521	687.000.000	1521	687.000.000	1525	712.000.000	
Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kejadian kebakaran dan non kebakaran yang di tangani	Kasus	106	55.500.000	114	111.557.100	114	149.800.000	118	163.000.000	118	178.500.000	118	178.500.000	120	203.500.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline		Target dan Pagu Indikatif												Ket
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	Target	Rp	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen NSPM pencegahan/penanggulangan kebakaran dalam daerah Kab/Kota setiap Tahunnya	Dokumen	1	3.000.000	1	4.986.200	1	25.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	
Sub kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	80	35.000.000	90	39.977.200	90	70.000.000	90	70.000.000	90	75.000.000	90	75.000.000	95	80.000.000	
Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Terlaksananya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	11	10.000.000	10	15.000.000	10	26.050.000	10	27.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	10	35.000.000	
Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi ketrampilan teknis dan analis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Orang	3	2.500.000	1	42.000	1	100.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	7	7.000.000	
Sub kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	jumlah dokumen hasil penyelnggaraan kerja sama dan koordinasi antar wilayah kabupaten /kota dalam pencegahan,penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Dokumen	3	5.000.000	3	1.626.000	3	5.550.000	3	6.000.000	3	6.500.000	3	6.500.000	3	6.500.000	
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasana Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perilindungan	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasana Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perilindungan	Jumlah Sarana dan Prasana Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perlindungan	Unit	NA	NA	9	49.925.700	9	23.100.000	9	30.000.000	10	32.000.000	10	32.000.000	10	40.000.000	
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		Jumlah desa/kelurahan yang mempunyai Relawan Kebakaran	Desa	903	980.889.434	1.402	500.084.000	1.402	500.200.000	1.402	508.000.000	1.402	508.500.000	1.402	508.500.000	1.402	508.500.000	
Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaan setiap tahunnya	Orang	1.500	973.894.434	1.400	500.000.000	1.400	500.000.000	1.400	500.000.000	1.400	500.000.000	1.400	500.000.000	1.400	500.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline		Target dan Pagu Indikatif												Ket
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	Target	Rp	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah desa/kel yang terbentuk dan terbina relawan Pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) tiap tahunnya	Desa/kel	3	2.000.000	1	42.000	1	100.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	
Sub kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah dokumen yang memuat jumlah SKKL Desa/Klurahan yang telah tersedia dukungan sapras Damkar	Dokumen	1	4.995.000	1	42.000	1	100.000	1	5.000.000	1	5.500.000	1	5.500.000	1	5.500.000	
SASARAN 3 Meningkatnya kinerja pelayanan Satpol PP		Nilai SAKIP																
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Nilai SAKIP dan Nilai IRB	Skor	63,82	11.005.173.825		15.372.270.250		13.240.588.000		15.744.865.850		15.737.872.800		15.737.872.800		15.746.872.800	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Dokumen	11	31.242.500	9	31.351.800	9	7.000.000	9	14.000.000	9	20.000.000	9	20.000.000	11	29.000.000	
Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	14.797.500	2	19.133.000	2	1.000.000	2	5.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	3	15.000.000	
Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1.000.000	1	1.433.800	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.500.000	
Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	Dokumen	1	1.000.000	1	1.425.800	1	1.000.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	
Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1.000.000	1	1.424.600	1	1.000.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	
Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil	Dokumen	1	1.000.000	1	1.476.400	1	1.000.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline		Target dan Pagu Indikatif												Ket
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	Target	Rp	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD																
Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Laporan	3	7.740.000	2	3.132.200	2	1.000.000	2	1.500.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	3.000.000	
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Laporan	1	4.705.000	1	3.326.000	1	1.000.000	1	2.000.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	5.000.000	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	27	7.568.152.017	68	9.941.805.800	68	10.312.088.000	68	10.410.500.000	68	10.411.500.000	68	10.411.500.000	68	10.411.500.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya penyediaan gaji dan tunjangan asn	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Bulan	14	7.557.925.017	56	9.935.856.000	56	10.309.088.000	56	10.405.000.000	56	10.405.000.000	56	10.405.000.000	56	10.405.000.000	
Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	1	3.475.000	1	2.494.000	1	1.000.000	1	2.000.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	Laporan	11	5.760.000	10	2.381.000	10	1.000.000	10	2.000.000	10	2.500.000	10	2.500.000	10	2.500.000	
Sub kegiatan Penyusunan laporan dan Analis Prognosis Realisasi Anggran	Tersedianya dokumen Pelaporan dan Analis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	992.000	1	1.074.800	1	1.000.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	150	200.988.000	1	160.299.400	101	4.920.000	101	150.000.000	81	140.000.000	81	140.000.000	81	140.000.000	
Sub Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	50	100.988.000	1	160.299.400	1	NA	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
Sub Kegiatan pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawaai berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	100	100.000.000	NA	NA	100	4.920.000	100	50.000.000	80	40.000.000	80	40.000.000	80	40.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline		Target dan Pagu Indikatif												Ket
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	Target	Rp	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	235	292.689.310	96	95.573.000	106	115.768.500	106	128.000.000	106	150.800.000	106	150.800.000	106	150.800.000	
Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Paket	5	7.500.000	4	7.994.600	4	4.987.500	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	7	35.905.530	2	1.000.000	2	1.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	
Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	7	26.932.930	6	24.939.000	16	18.108.500	16	20.000.000	16	25.000.000	16	25.000.000	16	25.000.000	
Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	25.669.750	2	10.129.600	2	7.006.500	2	9.000.000	2	9.800.000	2	9.800.000	2	9.800.000	
Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	4.750.000	2	5.000.000	2	NA	2	5.500.000	2	5.500.000	2	5.500.000	2	5.500.000	
Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	200	191.931.100	80	46.509.800	80	84.666.000	80	85.500.000	80	102.500.000	80	102.500.000	80	102.500.000	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	NA	NA	1	1.885.876.800	NA	NA	1	1.885.876.800	1	1.885.876.800	1	1.885.876.800	1	1.885.876.800	
Sub kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	NA	NA	1	1.885.876.800	NA	NA	1	1.885.876.800	1	1.885.876.800	1	1.885.876.800	1	1.885.876.800	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan	29	2.647.202.698	29	2.767.570.400	29	2.662.807.500	29	2.666.696.000	29	2.666.696.000	29	2.666.696.000	29	2.666.696.000	
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	1.500.000	2	1.498.200	2	2.004.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	138.079.330	12	168.155.000	12	126.607.500	12	130.000.000	12	130.000.000	12	130.000.000	12	130.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline		Target dan Pagu Indikatif												Ket
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	Target	Rp	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.505.662.868	12	2.594.917.200	12	2.531.196.000	12	2.531.196.000	12	2.531.196.000	12	2.531.196.000	12	2.531.196.000	
Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	Laporan	3	1.958.500	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Unit	65		46	489.793.050	46	489.793.050	46	489.793.050	46	463.000.000	46	463	46	463	
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	32	144.399.800	34	294.482.050	34	294.482.050	34	294.482.050	34	280.000.000	34	280.000.000	34	280.000.000	
Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	2.999.500	3	2.940.000	3	2.940.000	3	2.940.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	
Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	110.000.000	3	188.371.000	3	188.371.000	3	188.371.000	3	175.000.000	3	175.000.000	3	175.000.000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana gedung kantor lainya yang di pelihara/Rehabilitasi	Unit	15	7.500.000	6	4.000.000	6	4.000.000	6	4.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dukungan Satpol PP Kabupaten Pemalang terhadap program prioritas Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hidup berdampingan secara harmonis dan kondusif	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	
			Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban Umum	
			Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Penyusunan SOP Keteriban umum dan ketentraman masyarakat	
			Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,Pengamanan dan Pengawalan	
			Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
			Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
			Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
			Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS(Satuan Polisi Pamong Praja)	
			Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Program Prioritas	Outcome	Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
			Pengadaan Sarana dan Prasana Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perilindungan	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
			Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	
			Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	

Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable)* mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satpol PP Kabupaten Pemalang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Pemalang yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD. Selain IKU, terdapat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atau Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang telah ditetapkan. Secara lebih rinci IKU dan IKK dapat dilihat pada tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.4
Penetapan Indikator Kinerja Utama Satpol PP Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Utama Satpol PP Kabupaten Pemalang	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra		Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Presentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	58	70	100	100	100	100	100	100
2	Presentase Kawasan Patuh Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29
3	Rasio Kejadian Kebakaran	Persen	60	35,3	35,3	37	38	39	40	41	41
4	Cakupan Pelayanan Kebakaran	Persen	19,62	20	45	45	45	45	45	45	45
5	Nilai SAKIP	Nilai	63	63,82	63,82	64,82	65,82	66,82	67,82	68,82	68,82
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84,41	86,89	87,89	88,39	88,89	89,39	90,39	90,89	90,89

Tabel 4.5
Penetapan Indikator Kinerja Kunci Satpol PP Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Kunci Satpol PP Kabupaten Pemalang	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra		Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	96	98	80	85	90	95	100	100	100
3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	75	77,3	79	80,45	82,5	85	85
4	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	15	15	15	15	15	15	15	15	15

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat untuk periode tahun 2025-2029. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pemalang yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029. Sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L dan Renstra Pemerintah Provinsi untuk tercapainya sasaran pembangunan di Kabupaten Pemalang.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabuaten Pemalang. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman bersama dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Kabuaten Pemalang serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Pemalang. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Kabuaten Pemalang merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan atau target kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabuaten Pemalang. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabuaten Pemalang yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Kabuaten Pemalang harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LkjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabuaten Pemalang). Laporan Kinerja (LkjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja

https://jdih.pemalangkab.go.id

dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabuaten Pemalang di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabuaten Pemalang ini.

Pemalang, Juni 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PEMALANG

Drs. ACHMAD HIDAYAT, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19720407 199311 1 001

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasar Pasal 260 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah. Hal ini selaras dengan pasal 4 huruf e angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah. Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, Bapperida Kabupaten Pemalang secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Agar tujuan tersebut dapat tercapai harus didukung oleh perencanaan yang baik sehingga perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra disusun untuk mewujudkan visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Bapperida Kabupaten Pemalang sebagai salah satu Perangkat Daerah harus menyusun Renstra. Penyusunan Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 (selanjutnya disebut Renstra) sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih dilaksanakan bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Sebagian subtansi Renstra merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2029, pada pasal 10 yang mengamanatkan bahwa penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Nasional (RPJMN) dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal, maka periodesasi RPJMD Kabupaten Pemalang menyesuaikan dengan periodesasi tahapan 5 (lima) tahun pertama dalam RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 dan periodesasi RPJMN, yaitu Tahun 2025-2029. Dengan demikian, periodesasi Renstra juga mengikuti RPJMD, yaitu Tahun 2025-2029.

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun, dengan lingkup perencanaan kinerja dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. Adapun untuk kebutuhan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) rentang waktunya mulai Tahun 2026 sampai Tahun 2030. Renstra disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sehubungan dengan fungsi Bapperida Kabupaten Pemalang dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Penyusunan Renstra juga memperhatikan keterkaitan antara tujuan dan sasaran Daerah dengan tujuan dan sasaran Bapperida Kabupaten Pemalang, dimana program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Bapperida Kabupaten Pemalang harus mendukung tujuan dan sasaran Daerah sehingga visi dan misi Daerah dapat tercapai.

Renstra berfungsi sebagai alat kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanismenya telah memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Bapperida Provinsi Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang dan Wilayah dan Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Proses penyusunan Renstra meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1) Persiapan Penyusunan, terdiri dari pembentukan tim penyusun, orientasi mengenai Renstra, agenda kerja tim penyusun, penyiapan data dan informasi; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Renstra; (4) Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (6) Penetapan Renstra. Tahapan penyusunan Renstra disajikan dalam Gambar 1.1.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Gambar 1.1
Bagan Alur Penyusunan Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang
Tahun 2025-2029

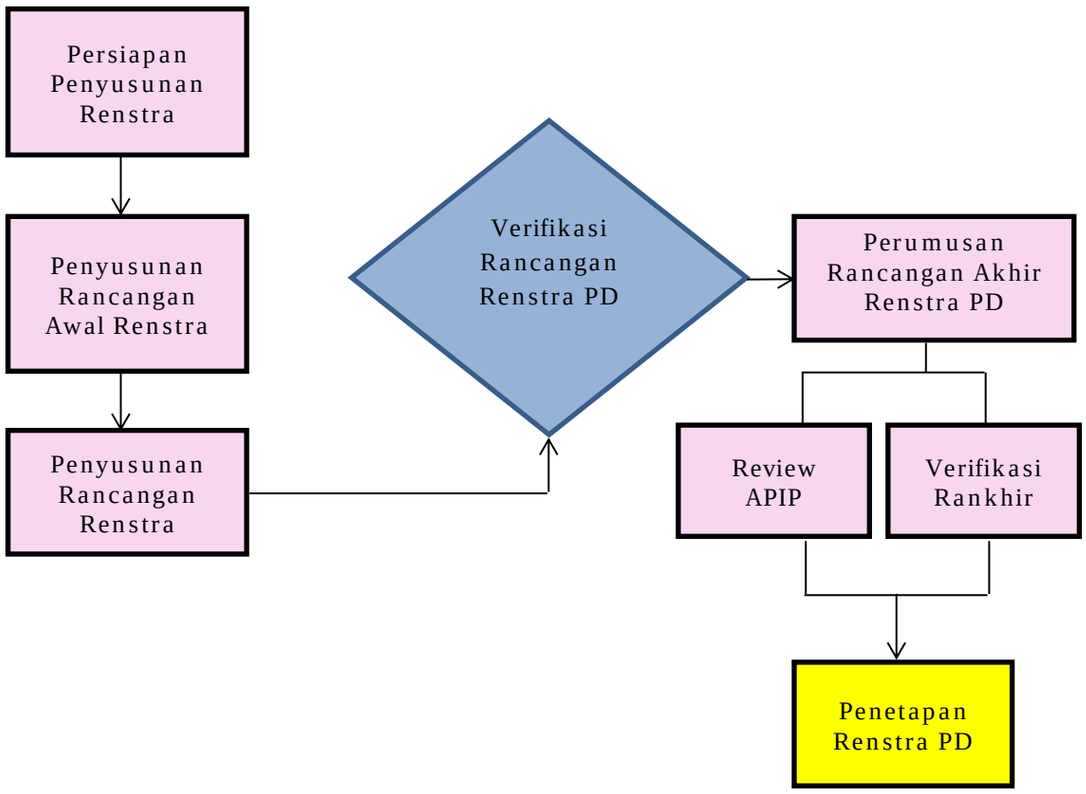

Sumber : Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 (diolah)

Renstra dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam Gambar 1.2.

Gambar 1.2
Keterkaitan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

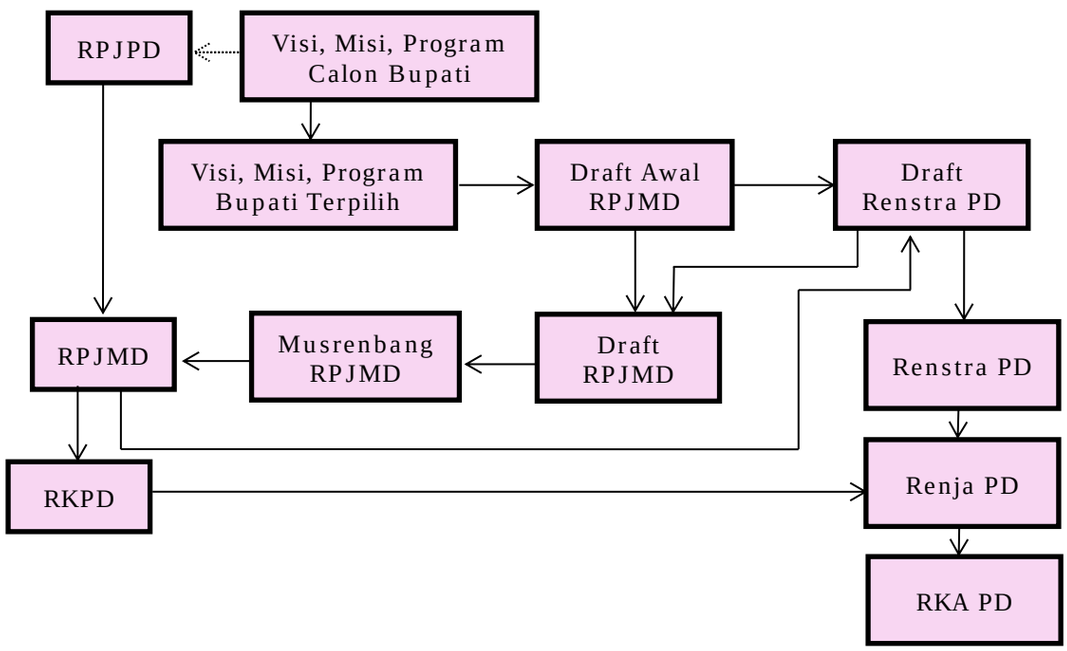

https://jdih.pemalangkab.go.id

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

https://jdih.pemalangkab.go.id

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2029 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

a. Sebagai penjabaran atas RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bapperida Kabupaten Pemalang;

b. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Bapperida Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan; dan

c. Sebagai indikator kunci keberhasilan Bapperida Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan tugas pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Pemalang.

2. Tujuan

a. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Bapperida Kabupaten Pemalang sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk untuk mengelola pencapaian sasaran RPJMD;

b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Bapperida Kabupaten Pemalang setiap tahunnya;

https://jdih.pemalangkab.go.id

c. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Bapperida Kabupaten Pemalang; dan

d. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen Renstra mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi tugas, fungsi, struktur organisasi, dan sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan dan kelompok sasaran layanan Perangkat Daerah; serta permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan isu strategis.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi uraian Program, uraian Kegiatan, uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, serta target kinerja pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V Penutup

Berisi kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bapperida Kabupaten Pemalang

Bapperida Kabupaten Pemalang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Bapperida merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bapperida menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi dinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bapperida Kabupaten Pemalang mempunyai struktur organisasi sebagaimana pada Gambar 2.1.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Bapperida Kabupaten Pemalang

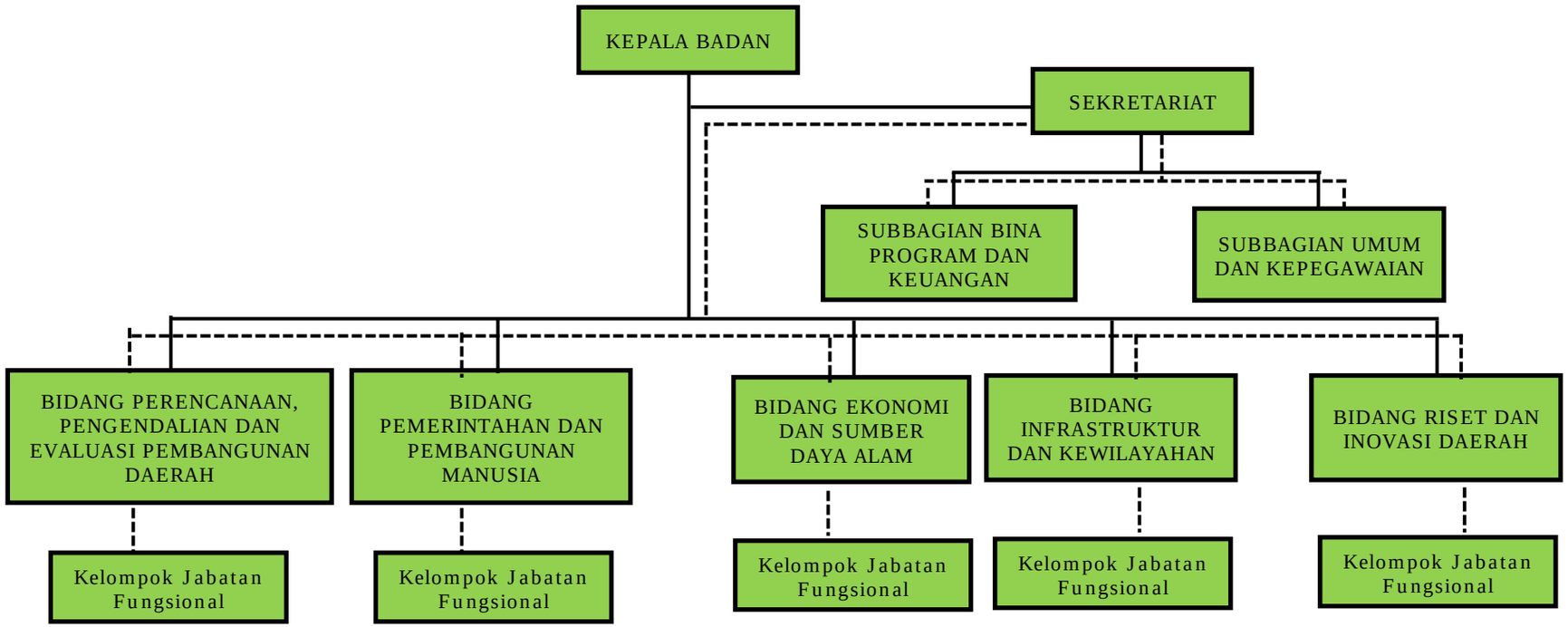

Keterangan:

——— *: Garis Hierarki*

- - - - - - - - - - *: Garis Koordinasi*

Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor Tahun 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sebagaimana Gambar 2.1 di atas, masing-masing unsur dari organisasi Bapperida memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Kepala Bapperida

- Tugas:
  Bertugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- Fungsi:
  1) Perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
  2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
  3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
  4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris Bapperida

- Tugas:
  Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Bapperida.
- Fungsi:
  1) Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Bapperida;
  2) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Bapperida;
  3) Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Bapperida;
  4) Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Bapperida;
  5) Penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
  6) Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Bapperida;

https://jdih.pemalangkab.go.id

7) Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Bapperida;
8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan**

  Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program dan keuangan.

- **Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian**

  Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

c. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- Tugas:
  Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- Fungsi:
  1) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
  2) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Kepala Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia

- Tugas:
  Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- Fungsi:
  1) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
  2) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

- Tugas:
  Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ekonomi dan sumber daya alam.
- Fungsi:

https://jdih.pemalangkab.go.id

1) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ekonomi dan sumber daya alam; dan
2) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Kepala Bidang Insfrastuktur dan Kewilayahan

- Tugas:
  Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- Fungsi:
  1) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
  2) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah

- Tugas:
  Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- Fungsi:
  1) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
  2) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sumber Daya Bapperida Kabupaten Pemalang

Setiap Perangkat Daerah tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara optimal tanpa dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya menjadi penopang utama dalam menyusun kebijakan, melaksanakan program, serta memberikan layanan publik. Kekurangan atau ketidaksesuaian sumber daya bisa menyebabkan kebijakan yang tidak efektif dan pelayanan yang buruk. Tanpa sumber daya yang cukup dan dikelola dengan baik, tujuan dan sasaran akan sulit dicapai.

a. Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Jumlah pegawai Bapperida Kabupaten Pemalang sejumlah 41 orang, terdiri dari 21 laki-laki dan 20 perempuan, dengan rincian tersaji dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Pegawai Bapperida Kabupaten Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Uraian	L	P	Golongan					Jumlah
				PPPK	I	II	III	IV	
1	Kepala	1	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	1	-	-	-	-	1	1
3	Kepala Bidang	-	4	-	-	-	1	3	4
4	Kepala Subbagian	1	1	-	-	-	1	1	2
5	Kepala Unit	-	1	-	-	-	-	1	1
6	Analis Kebijakan Muda	1	-	-	-	-	1	-	1
7	Fungsional Perencana	4	6	-	-	-	10	-	10
8	Fungsional Pranata Komputer	1	-	-	-	-	1	-	1
9	Pengolah Data dan Informasi	7	1	-	-	-	8	-	8
10	Operator Layanan Operasional 3	2	-	-	-	2	-	-	2
11	Penelaah Teknis Kebijakan	1	2	-	-	-	3	-	3
12	Pengadministrasi Perkantoran	2	-	-	-	-	2	-	2
13	Fasilitator Pemerintahan	-	1	-	-	-	1	-	1
14	Peneliti	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Analis Pemanfaatan IPTEK	-	-	-	-	-	-	-	-
16	PPPK	1	3	4	-	-	-	-	4
Jumlah		**21**	**20**	**4**	**0**	**2**	**28**	**7**	**41**

Sumber: Bapperida Kabupaten Pemalang, 2025

Dari tabel di atas, dilihat dari segi golongan, pegawai Bapperida terdiri dari golongan II sebanyak 2 (dua) orang, golongan III sebanyak 28 orang, golongan IV sebanyak 7 (tujuh) orang, dan PPPK sebanyak 4 (empat) orang. Pada rencana Struktur Orgasisasi dan Tata Kerja (SOTK) Bapperida ke depan, Unit Pelakana Teknis (UPT) Penelitian dan Pengembangan akan berubah menjadi Bidang Riset dan Inovasi Daerah. Guna menunjang pelaksanaan tugas pada Bidang tersebut, maka dibutuhkan tambahan Peneliti sebanyak 2 (dua) orang dan Analisis Pemanfaatan IPTEK sebanyak 2 (dua) orang.

Diklat Kepemimpinan merupakan instrumen strategis dalam membentuk Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pemimpin perubahan yang mampu menjalankan birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani. Data ASN Bapperida yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Data Pegawai Berdasar Diklat Kepemimpinan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Diklatpim II	1	1	-
2	Diklatpim III	-	-	-
3	Diklatpim IV	8	2	6
4	ADUM	-	-	-
5	SEPADA	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

6	Struktural yang belum diklat	1	-	1
Jumlah		**10**	**3**	**7**

Sumber : Bapperida Kabupaten Pemalang, 2025

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 49% atau 20 orang pegawai Bapperida berpendidikan Sarjana (S1), 22% atau 9 orang Pasca Sarjana (S2), dan sisanya SLTA, Diploma III, Diploma IV dan Doktor (S3). Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Doktor (S3)	1
2	Pasca Sarjana (S2)	9
3	Sarjana (S1)	20
4	Diploma IV	1
5	Diploma III	2
6	SLTA	8
7	SLTP	-
8	SD	-
Jumlah		**41**

Sumber : Bapperida Kabupaten Pemalang, 2025

Berdasarkan usia, komposisi pegawai paling banyak berusia di atas 50 tahun yaitu 14 orang. Diikuti dengan pegawai pada rentang usia 41-50 tahun sebanyak 11 orang, rentang usia 31-40 tahun sebanyak 9 orang, dan di bawah 30 tahun sebanyak 7 orang sebagaimana pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5.
Data Pegawai Berdasar Usia

No	Rentang Usia	Jumlah
1	≤ 30 tahun	7
2	31 – 40 tahun	9
3	41 – 50 tahun	11
4	> 50 tahun	14
Jumlah		**41**

Sumber : Bapperida Kabupaten Pemalang, 2025

b. Kondisi Prasarana dan Sarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis, jumlah, dan kondisi prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Bapperida Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada Tabel 2.5.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.5.
Jenis, Jumlah dan Konsisi Prasarana dan Sarana
Bapperida Kabupaten Pemalang

No	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
1	**Tanah**				
	- Tanah	2	2	-	-
2	**Peralatan dan Mesin**				
	- Alat-alat Besar	3	2	-	1
	- Alat-alat Angkutan	42	30	5	7
	- Alat Bengkel dan Alat Ukur	1	1	-	-
	- Alat Pertanian	1		1	-
	- Alat Kantor & Rumah Tangga	768	513	192	63
	- Alat Studio & Alat Komunikasi	77	67	7	3
	- Alat Laboratorium	1	1	-	-
3	**Gedung dan Bangunan**				
	- Bangunan Gedung	10	10	-	-
4	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**				
	- Instalasi	4	4	-	-
	- Jaringan	1	1	-	-
5	**Aset Tetap Lainnya**				
	- Buku dan Perpustakaan	528	528	-	-
	- Barang bercorak kebudayaan	1	1	-	-

Sumber: LKjIP Bapperida Kabupaten Pemalang, 2024

Berdasar tabel di atas, prasarana dan sarana perkantoran yang dimiliki oleh Bapperida Kabupaten Pemalang cukup memadai. Untuk menunjang kegiatan rapat, Bapperida memiliki 4 (empat) ruang rapat, yaitu ruang rapat selatan dan utara masing-masing dengan kapasitas 40 orang, ruang rapat Sekretariat dengan kapasitas 15 orang dan ruang rapat Bidang Ekosda dengan kapasitas 10 orang.

3. Kinerja Pelayanan Bapperida Kabupaten Pemalang

Gambaran kinerja Bapperida lima tahun sebelumnya Tahun 2020-2024 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan Tabel 2.7 berikut.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.6.
Capaian Kinerja Pelayanan Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024

No	Indikator Kerja	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Perangkat Daerah Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai SAKIP komponen perencanaan	Angka	-	-	-	22,22	22,24	22,26	22,28	22,3	22,22	22,56	22,58	22,68	22,35	100,00	101,44	101,44	101,80	100,22
2	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang baik	%	-	-	-	12,19	19,51	26,83	34,15	41,46	12,19	24,39	60,97	63,41	63,40	100,00	125,01	227,25	185,68	152,92
3	Tingkat keselarasan antara program RKPD dengan RPJMD	%	-	-	-	100	100	100	100	100	99,49	100	100	100	100	99,49	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang PPM dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	-	-	-	100	100	100	100	100	83,73	100	100	100	100	83,73	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang EkoSDA dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	-	-	-	100	100	100	100	100	85,71	100	100	100	100	85,71	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah	%	-	-	-	100	100	100	100	100	83,33	100	100	100	100	83,33	100,00	100,00	100,00	100,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Indikator Kerja	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Perangkat Daerah Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	rumpun bidang IPW dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah																			
7	Persentase Prioritas Usulan Hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	%	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	%	-	-	-	80	81	82	83	84	80	81	85	90	93	100,00	100,00	103,66	108,43	110,71

Sumber : Bapperida Kabupaten Pemalang, 2025

Keterangan:

- RKPD Tahun 2020 dan 2021 belum menggunakan Permendagri 90 Tahun 2019
- SIPD mulai digunakan dalam penyusunan RKPD mulai RKPD Tahun 2021

https://jdih.pemalangkab.go.id

Selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagian besar indikator kinerja Bapperida tercapai sesuai target. Hanya pada indikator-berikut yang capaiannya pada tahun 2020 tidak sesuai target, karena pada masa itu penyusunan RKPD masih manual, belum menggunakan SIPD, sehingga ada ketidaksinkronan Program/Kegiatan antar dokumen perencanaan dapat terjadi, antara lain indikator:

a. Tingkat keselarasan antara program RKPD dengan RPJMD;
b. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang PPM dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
c. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang EkoSDA dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
d. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang IPW dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Faktor-faktor yang mendukung ketercapaian kinerja Bapperida Kabupaten Pemalang selama periode 2020-2024 adalah:

a. Sumber Daya Manusia yang makin kompeten;
b. Pendidikan dan pelatihan pegawai;
c. Sarana dan prasarana;
d. Budaya kerja;
e. Pengendalian, monitoring dan evaluasi;
f. Kerja sama dengan pihak luar (tenaga ahli dan akademisi) dalam upaya *transfer knowledge*;
g. Koordinasi yang baik dengan instansi Pusat, Provinsi Jawa Tengah maupun *stakeholder* terkait.

Adapun hal yang menjadi penghambat pencapaian kinerja pelayanan Bapperida Kabupaten Pemalang antara lain:

a. Adanya pemahaman yang berbeda dalam menyusun dokumen perencanaan;
b. Persepsi evaluator yang belum tentu sama pada saat menilai perangkat daerah;
c. Adanya perubahan regulasi dari tingkat Pusat terkait perencanaan yang mengharuskan daerah agar segera menyesuaikan;
d. Capaian komponen pendukung kapabilitas inovasi yang kurang optimal;
e. Kurang optimalnya data dukung inovasi;
f. Terbatasnya anggaran riset;
g. Kurangnya pemahaman pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di masyarakat.

Sementara itu beberapa hal eksternal yang mempengaruhi kinerja Bapperida Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu tersebut adalah:

a. Pandemi Covid

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dampak dari pandemi Covid tahun 2019-2020 mempengaruhi kondisi sosial ekonomi Kabupaten Pemalang, bahkan Nasional dan Dunia. Hal tersebut juga mempengaruhi kinerja Bapperida Kabupaten Pemalang selaku Perangkat Daerah dengan tugas dan fungsi penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Pemalang karena prioritas pembangunan lebih difokuskan pada penanganan pandemi dan pasca pandemi. Kebijakan *refocussing* yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Pemalang pada tahun 2020 dan 2021 menuntut untuk tetap mengoptimalkan anggaran yang ada tetapi target capaian indikator kinerja tetap terpenuhi dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempengaruhi perubahan struktur belanja dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung menjadi Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer;
c. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mempengaruhi nomenklatur Program dan indikator kinerja, nomenklatur Kegiatan dan Subkegiatan. Terakhir dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bapperida Kabupaten Pemalang

Uraian	Pagu Indikatif Renstra pada Tahun (Rp. 000)					APBD pada Tahun (Rp. 000)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. 000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota	2.110.000	7.953.530	9.096.854	9.411.714	9.411.714	2.096.451	7.953.520	9.280.154	7.764.949	8.513.978	2.022.753	7.735.271	8.504.094	7.423.820	7.299.020	96,48	97,26	91,64	95,61	85,73	-15.24	3,43
Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.200.000	723.420	800.479	1.045.479	1.020.479	1.305.437	723.420	494.302	818.385	1.156.046	1.277.100	712.796	473.247	816.160	1.153.356	97,83	98,53	99,73	99,73	99,77	-45,19	-47,62
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.811.000	1.101.948	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.125.271	1.173.225	1.725.699	962.456	1.235.255	1.107.848	1.123.517	1.637.626	957.837	1.207.237	98,45	95,76	99,52	99,52	97,73	-40,36	-38,13
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	425.000	258.825	2.645.000	2.645.000	2.645.000	310.838	470.738	1.119.050	950.000	1.437.200	286.214	427.422	774.555	829.121	1.226.453	92,08	90,80	87,28	87,28	85,34	-47,77	30,87

Sumber : Bapperida Kabupaten Pemalang, 2025

Keterangan:

- RKPD Tahun 2020 dan 2021 belum menggunakan Permendagri 90 Tahun 2019
- Permendagri 90 Tahun 2019 mulai digunakan pada penyusunan APBD 2021
- SIPD mulai digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2021

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dari sisi anggaran untuk pendanaan pelayanan Bapperida Kabupaten Pemalang yang disajikan pada Tabel 2.7 di atas, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

a. Perencanaan dan penganggaran tahun 2020 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 yang masih menggunakan nomenklatur Program berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu diperlukan persandingan dengan nomenklatur Program berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagai berikut:

Tabel 2.8
Penyandingan Program RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 dan Program Permendagri 90 Tahun 2019

No	Program RPJMD Tahun 2016-2021	Program Permendagri 90 Tahun 2019
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
5	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
4	Program pengembangan data/informasi	
5	Program kerjasama pengembangan	
6	Program perencanaan pembangunan daerah	
7	Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
8	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	
9	Program perencanaan pembangunan ekonomi	
10	Program perencanaan sosial dan budaya	
11	Program optimalisasi penelitian dan pengembangan	Program penelitian dan pengembangan daerah

b. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, secara rata-rata realisasi pendanaan Program di Bapperida selama kurun waktu tahun 2020-2024 masuk dalam kategori baik dan sangat baik, dengan tingkat capaian di atas 85% dan di atas 90%.

4. Kelompok Sasaran dan Mitra Bapperida Kabupaten Pemalang

a. Kelompok Sasaran Internal

Kelompok sasaran internal merujuk pada para pemangku kepentingan yang berada di dalam lingkup pemerintahan daerah. Mereka adalah mitra kerja utama Bapperida dalam siklus perencanaan dan penganggaran. Kelompok ini meliputi:

1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Bapperida bekerja sama erat dengan DPRD, terutama dalam proses perencanaanproses pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bapperida menyediakan data dan analisis yang dibutuhkan oleh DPRD untuk menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan mereka.

2) Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Seluruh dinas, badan, dan kantor di lingkungan pemerintah daerah menjadi sasaran sekaligus mitra Bapperida. Bapperida bertugas menyinergikan dokumen perencanaan setiap OPD agar selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Bapperida juga memberikan pendampingan teknis dalam penyusunan Renstra dan Renja masing-masing OPD.

b. Kelompok Sasaran Eksternal

Kelompok sasaran eksternal adalah pihak-pihak di luar struktur pemerintahan daerah yang memiliki kepentingan dan/atau terdampak oleh kebijakan pembangunan daerah. Keterlibatan mereka sangat penting dalam pendekatan perencanaan partisipatif. Kelompok ini antara lain:

1) Masyarakat Umum

Sebagai penerima manfaat utama dari pembangunan, masyarakat umum merupakan sasaran akhir dari semua Program, Kegiatan, dan Subkegiatan yang direncanakan. Bapperida, melalui Forum Konsultasi Publik, serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di berbagai tingkatan, berupaya menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk diakomodasikan dalam perencanaan pembangunan.

2) Dunia Usaha dan Investor

Iklim investasi dan kemudahan berusaha di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi yang dirumuskan oleh Bapperida. Oleh karena itu, dunia usaha dan para investor

https://jdih.pemalangkab.go.id

menjadi sasaran penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi untuk menciptakan pertumbuhan dan lapangan kerja.

3) Akademisi dan Perguruan Tinggi
   Kalangan akademisi dengan keahlian dan hasil penelitiannya menjadi mitra strategis Bapperida dalam menyusun perencanaan berbasis data dan kajian yang mendalam (*evidence-based planning*). Mereka memberikan masukan, analisis, dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan.
4) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)
   LSM dan Ormas seringkali menjadi representasi dari kepentingan spesifik di masyarakat, seperti isu lingkungan, sosial, dan hak asasi manusia. Bapperida melibatkan mereka untuk mendapatkan perspektif yang beragam dan memastikan pembangunan yang inklusif.
5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
   Bapperida juga berinteraksi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan RPJMN dan proyek-proyek strategis nasional. Berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya sinkronisasi dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah serta program strategis Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi di Kabupaten Pemalang. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah di sekitarnya juga diperlukan untuk isu-isu lintas batas seperti pengelolaan daerah aliran sungai, pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional, pengelolaan persampahan, serta penanganan rob.

5. Kerjasama Daerah Bapperida Kabupaten Pemalang

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di bidang Perencanaan serta Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapperida menjalin kerjasama dengan berbagai pihak sebagaimana tertuang pada Tabel 2.8.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tebal 2.9

Daftar Kerja Sama Daerah Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024

No	Tahun	Mitra	Judul	Nomor	Tanggal
1	2020	Rekto UPS Tegal		415.12/02/RKS/Tapem/2020	10 Maret 2020
2		Ketua STIE ASSHOLEH Pemalang		415.12/05/RKS/Tapem/2020	11 Maret 2020
3		Ketua STIT Pemalang		415.12/04/RKS/Tapem/2020	11 Maret 2020
4		Rektor UNSOED Purwokerto		415.12/03/RKS/Tapem/2020	11 Maret 2020
5		Rektor UMY		415.12/06/RKS/Tapem/2020	12 Maret 2020
6		Rektor UNIKAL		415.12/07/RKS/Tapem/2020	12 Maret 2020
7		IAIN Pekalongan		415.12/09/RKS/Tapem/2020	16 Maret 2020
8		Rektor UNDIP Semarang	Penguatan Sistem Inovasi Daerah Melalui Tridharma Perguruan Tinggi	415.12/10/RKS/Tapem/2020	17 Maret 2020
9		Rektor UNTAG Semarang		415.12/11/RKS/Tapem/2020	17 Maret 2020
10		Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto	Peningkatan Pembangunan dan Penguatan Sistem Inovasi Daerah Di Kabupaten Pemalang Melalui Tridharma Perguruan Tinggi	415.1/09/PKS/Tapem/2020	01 Mei 2020
11		Rektor Universitas Sultan Agung Semarang	Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Pemalang Melalui Tridharma Perguruan Tinggi	415.1/10/PKS/Tapem/2020	04 September 2020
12		Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia (STIEPARI)	Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Pemalang Melalui Tridharma Perguruan Tinggi	415.1/03/KB/Tapem/2020	11 November 2020
13		Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto	Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Pemalang Melalui Tridharma Perguruan Tinggi	415.1/02/KB/Tapem/2020	12 November 2020

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Tahun	Mitra	Judul	Nomor	Tanggal
14		Universitas Tidar Magelang	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pemalang Melalui Tridharma Perguruan Tinggi	415.12/03/NK/Tapem/2020	17 Desember 2020
15		Universitas PGRI Semarang	Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Pemalang Melalui Tridharma Perguruan Tinggi	415.1/05/KB/Tapem/2020	18 Desember 2020
16	2021	Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan	Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Pemalang Melalui Tridharma Perguruan Tinggi	415.1/02/KB/TAPEM/2021	04 Februari 2021
17		Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto	Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Pengabdian Kepada Masyarakat	415.1/02/PKS/Tapem/2021	17 Februari 2021
18		Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia (STIEPARI)	Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Pemalang melalui Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	415.1/03/PKS/Tapem/2021	18 Februari 2021
19		Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan	Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Pemalang melalui Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	415.1/05/PKS/Tapem/2023	02 Maret 2021
20	2022	Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan	Pengembangan dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Usaha Mikro kecil Menengah	415.1/02/PKS/TAPEM /2022	
21		Pemerintah Kabupaten Tegal	Pemanfaatan Bersama Sumber Air Baku dari Mata Air Tuk Sumber/JAMBE bagi Masyarakat Kabupaten Pemalang dan Masyarakat Tegal	130.13/02/KB/TAPEM/2022	

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Tahun	Mitra	Judul	Nomor	Tanggal
22	2023	Univeristas 17 Agustus 1945	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	415.1/02/KB/TAPEM/2023	23 Februari 2023
23		Universitas ALMA ATA	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	415.1/04/KB/Tapem/2023	15 Maret 2023
24		Institut Pertanian Bogor	Sintesa (Sistem Integrasi Horizontal Ekonomi Desa untuk Industri Pangan)	415.12/02/NK/Tapem/2023	08 Agustus 2023
25		Universitas Pancasakti Tegal	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pemalang melalui Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi	415.1/05/KB/Tapem/2023	22 November 2023
26	2024	Universitas Negeri Semarang	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pemalang Melalui Tridharma Perguruan Tinggi	100.3.7.1/04/NK/TAPEM/2024	04 Juni 2024
27		Universitas Jenderal Soedirman	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pemalang Melalui Tridharma Perguruan Tinggi	100.3.7.1/05/NK/TAPEM/2024	09 September 2024
28		Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pemalang Melalui Tridharma Perguruan Tinggi	100.3.7.1/06/NK/TAPEM/2024	09 September 2024

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Permasalahan Pelayanan Bapperida Kabupaten Pemalang

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Permasalahan merupakan kesenjangan antara capaian kinerja dengan target kinerja. Bapperida Kabupaten Pemalang telah melakukan evaluasi terhadap Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa yang mengalami penurunan. *Pertama,* kualitas perencanaan dengan indikator kinerja Nikai SAKIP Komponen Perencanaan mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 22,35 dari sebelumnya sebesar 22,68 di tahun 2023. Ke depan perlu melakukan evaluasi dan perbaikan strategi, serta memastikan bahwa target kinerja yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan serta sumber daya yang dimiliki. *Kedua,* kualitas koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan indikator kinerja Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Baik mengalami penurunan dari 63,41 di tahun 2023 menjadi 63,40 di tahun 2024. Hal ini menunjukan bahwa asistensi yang dilakukan perlu lebih intens pelaksanaannya meskipun dengan sumber daya manusia yang terbatas.

Dari hasil evaluasi serta ekspektasi masa depan berkaitan dengan tugas dan fungsinya, Bapperida Kabupaten Pemalang mengidentifikasi permasalahan yang dipetakan pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Bapperida Kabupaten Pemalang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kurangnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Dokumen perencanaan pembangunan telah disusun namun belum sepenuhnya memenuhi ketentuan regulasi	Kurangnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah
			Kapasitas SDM belum memadai
		Kurangnya keselarasan dan konsistensi antar dokumen perencanaan	Masih kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah desa dan DPRD

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Kualitas data dan informasi pembangunan belum memadai	Kurangnya koordinasi penyediaan data dan informasi pembangunan
			Kurangnya pengelolaan data dan informasi pembangunan
			Kurangnya kualitas SDM penyedia dan pengolah data dan informasi pembangunan
		Kurang optimalnya pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah	Hasil pengendalian dan evaluasi belum secara optimal digunakan sebagai masukan untuk perencanaan berikutnya
			Terbatasnya alokasi waktu untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi, terutama pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan kinerja
			Pengendalian dan evaluasi masih bersifat administratif
			Kualitas SDM belum memenuhi
		Kurangnya integrasi perencanaan sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah	Kurangnya sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan sektoral dan perencanaan pembangunan daerah
			Kualitas SDM belum memenuhi
		Kinerja Perangkat Daerah belum mendukung pencapaian kinerja Daerah	Pengawalan dalam penjenjangan kinerja kurang optimal
			Intervensi politis yang tidak selaras dengan prioritas pembangunan
		Perencanaan belum berbasis risiko	Kapasitas SDM belum memadai
			Penyusunan risiko masih bersifat administratif
		Belum optimalnya implementasi hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah	Belum optimalnya sinergi antara hasil kelitbangan dengan perencanaan pembangunan
			Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM kelitbangan
			Kurangnya koordinasi dan inisiasi dalam upaya mengoptimalkan hasil kelitbangan untuk kebutuhan perencanaan pembangunan

https://jdih.pemalangkab.go.id

2. Telaahan RPJMN Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil telahaan terhadap RPJMN Tahun 2025-2029, salah satu tantangan pembangunan yang dihadapi adalah tata kelola dan akuntabilitas pemerintah. *Pertama,* terkait dengan pemberantasan korupsi, yang merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua kepentingan. Bapperida sebagai Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, memiliki peran penting dan strategis dalam upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah pada area perencanaan sebagaimana tertuang dalam Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Nomor: B/8493/KSP.00/70-73/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 Hal: Penyampaian Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2025. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis pada 3 (tiga) sasaran yang merupakan prioritas kerawanan korupsi pada area perencanaan, yaitu perencanaan pembangunan daerah, pokok pikiran, serta penyaluran hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.

Kedua, tata kelola data. Tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Pasal 7 menyebutkan bahwa “Data dan Informasi Pembangunan Daerah dikelola oleh Bapperida sebagai bagian dari proses penyelenggaran pembangunan daerah”. Data dan informasi yang dikelola oleh Bapperida menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan terkait program dan kegiatan pembangunan, oleh karena itu harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

3. Telaahan Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil KLHS, beberapa program yang dilaksanakan oleh Bapperida tidak terindikasi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dari hasil penapisan yang dilakukan yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis dan program prioritas yang memiliki pengaruh terhadap isu-isu strategis, pada urusan penunjang pemerintahan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan dinilai tidak mempunyai pengaruh/dampak terhadap isu strategis sehingga tidak perlu untuk merumuskan mitigasi atau

https://jdih.pemalangkab.go.id

alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

4. Isu Strategis

Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bapperida merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan.

Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana Tabel 2.10 di atas maka isu strategis Bapperida Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikutnya:

a. Dokumen perencanaan pembangunan belum sesuai dengan regulasi;
b. Kualitas data dan informasi pembangunan belum memadai;
c. Kurang optimalnya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
d. Kinerja Perangkat Daerah belum mendukung pencapaian kinerja Daerah;
e. Belum optimalnya implementasi hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah Bapperida Kabupaten Pemalang mendukung pada pencapaian sasaran ke-2 RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, yaitu meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik. Bapperida sesuai dengan tugas dan fungsinya, berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, serta koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah. Untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah daerah tersebut, perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara konsisten, terintegrasi, dan berbasis data agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan. Keterpaduan antara RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja OPD menjadi kunci untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil (*result oriented*).

Perencanaan pembangunan juga harus mampu menjawab tantangan baru seperti disrupsi teknologi, perubahan iklim, dan dinamika ekonomi global. Oleh karena itu perencanaan pembangunan yang disusun jangan hanya mengandalkan pola rutin (*business as usual*) tetapi juga menempatkan riset dan inovasi sebagai salah satu aspek penting. Disamping data statistik serta hasil evaluasi, hasil riset dan inovasi menjadi landasan utama untuk memastikan program pembangunan lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Selain itu, efektivitas dan efisiensi birokrasi juga ditingkatkan melalui penetapan prioritas pembangunan yang fokus pada isu strategis dan berdampak luas, sinergi antar OPD untuk menghindari duplikasi program, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung *e-government* dan digitalisasi layanan publik.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Gambar 3.1
Visi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang
Tahun 2025-2029

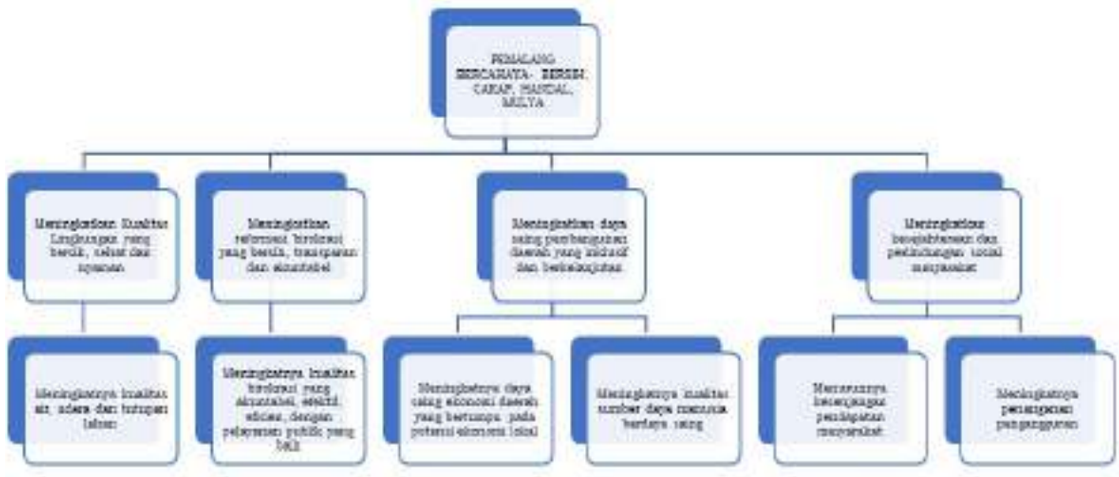

Sumber: RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Dalam jangka menengah, tercapainya visi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yaitu Pemalang Bercahaya: Bersih, Cakap, Handal, Mulya, tergambarkan melalui 4 (empat) tujuan, yaitu:

a. Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman;
b. Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel;
c. Meningkatkan daya saing pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan;
d. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat.

Keempat tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pemalang tersebut tercerminkan dalam pencapaian 6 (enam) sasaran, yaitu:

a. Meningkatnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan;
b. Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik;
c. Meningkatnya daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal;
d. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing;
e. Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat;
f. Meningkatnya penanganan pengangguran.

1. Tujuan Bapperida Kabupaten Pemalang

Tujuan Renstra OPD Tahun 2025-2029 merupakan kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan OPD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD. Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dirumuskan sebelumya pada Bab II, tugas dan fungsi Bapperida, serta sasaran ke-2 RPJMD, yaitu meningkatnya kualitas

https://jdih.pemalangkab.go.id

birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik, maka Bapperida Kabupaten Pemalang mempunyai 1 (satu) tujuan jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2025–2029, yaitu: "**Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah".**

2. Sasaran Bapperida Kabupaten Pemalang

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bapperida dalam rangka pencapaian tujuan selama Tahun 2024-2029 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan regulasi.
b. Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan.
c. Meningkatnya implementasi riset dan inovasi daerah dalam perencanaan pembangunan.
d. Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas OPD.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Bapperida Kabupaten Pemalang dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bapperida Kabupaten Pemalang

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP) Daerah	Indeks	83,877	84,3770	84,5645	84,9395	85,5645	85,7520	85,9395	
	Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan regulasi	Persentase keterpenuhan substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan regulasi	%	-	100	100	100	100	100	100	
	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan	Persentase Keselarasan Program dengan Prioritas Daerah dan Prioritas Nasional	%	-	100	100	100	100	100	100	
	Meningkatnya implementasi riset dan inovasi daerah dalam perencanaan pembangunan	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	49	51	53	55	57	59	61	
	Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	86,88	87,18	87,48	87,78	88,08	88,38	88,68	
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	68,20	68,80	69,40	70,00	70,60	71,20	71,80	

https://jdih.pemalangkab.go.id

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra. Sedangkan arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra OPD.

Perumusan strategi dan arah kebijakan Renstra disusun sebagai pendekatan dalam pemecahan permasalahan tugas dan fungsi, berdasarkan kerangka kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu jangka menengah. Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Bapperida guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk menentukan strategi dan arah kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra, disusun analisa SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat) pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Analisa SWOT Bapperida Kabupaten Pemalang

Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)	Opportunity (Peluang)	Threat (Ancaman)
1. Kualifikasi jenjang pendidikan pegawai (SDM) yang cukup tinggi hingga S3; 2. Tersedianya pegawai fungsional perencana dengan jumlah yang cukup; 3. Memiliki jejaring dengan OPD, DPRD, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perguruan tinggi serta pemangku kepentingan lain;	1. Kompetensi SDM perencana belum merata dan optimal (gap kompetensi); 2. Dukungan data dan informasi yang mendukung proses perencanaan belum sepenuhnya tersedia dan terstruktur dengan baik; 3. Belum efektifnya koordinasi lintas OPD, menyebabkan duplikasi program;	1. Dukungan kebijakan nasional tentang *e-government*, *e-planning*, SPBE, dan reformasi birokrasi; 2. Dukungan proyek strategis nasional di daerah dan peluang pembiayaan pembangunan daerah dari pemerintah provinsi maupun pusat yang membuka peluang sinkronisasi program daerah dengan pusat; 3. Perkembangan sistem teknologi	1. Belum efektifnya koordinasi antara perencanaan, pengendalian dan evaluasi; 2. Sikap egosektoral antar instansi; 3. Sering terjadi perbedaan prioritas pembangunan antara pusat dan daerah; 4. Dinamisasi peraturan dalam perencanaan juga pelaksanaan pembangunan yang membutuhkan adaptasi cepat; 5. Keterbatasan fiskal daerah; 6. Tingginya ekspektasi masyarakat

https://jdih.pemalangkab.go.id

Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)	Opportunity (Peluang)	Threat (Ancaman)
4. Adanya SIPD untuk mendukung transparansi perencanaan 5. Dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai	4. Belum optimalnya kegiatan pengendalian dan evaluasi; 5. Belum efektifnya tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi program dan kegiatan; 6. Belum optimalnya implementasi riset dan inovasi dalam perencanaan; 7. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi.	informasi yang mampu mendukung proses perencanaan pembangunan daerah; 4. Adanya peluang peningkatan kompetensi SDM perencana dari pihak eksternal baik tawaran beasiswa maupun *short course;* 5. Kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam penguatana data, kajian, serta inovasi kebijakan; 6. Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang partisipatif dan transparan.	terhadap hasil pembangunan dalam jangka pendek, sementara perencanaan bersifat jangka menengah/panjang; 7. Persaingan antar daerah dalam menarik program dari pemerintah provinsi maupun pusat.

Selanjutnya dari hasil analisa SWOT tersebut, dirumuskan strategi dan arah kebijakan yang dapat diterapkan di Bapperida Kabupaten Pemalang sebagaimana disajikan dalam tabel 3.3.

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan regulasi	1. Pemenuhan standar regulasi dalam penyusunan dokumen;	1. Implementasi regulasi di bidang perencanaan;

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2. Penguatan SDM fungsional perencana penyusunan dokumen perencanaan; 3. Memperkuat peran koordinasi Bapperida agar OPD adaptif terhadap dinamika regulasi dan keterbatasan fiskal; 4. Mendorong integrasi data sektoral antar OPD dengan memanfaatkan teknologi informasi; 5. Meningkatkan transparansi dan partisipasi publik untuk menjawab ekspektasi masyarakat.	2. Pembentukan Tim penyusun dokumen perencanaan yang handal; 3. Pelibatan aktif OPD dalam penyusunan dokumen perencanaan; 4. Penguatan tata kelola perencanaan pembangunan daerah.
	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan	1. Melaksanakan amanah pusat dan provinsi yang wajib dituangkan dalam dokumen perencanaan; 2. Menyelaraskan perencanaan daerah dengan kebijakan nasional agar program lebih sinkron; 3. Mengembangkan sistem pengendalian dan evaluasi; 4. Menyusun kebijakan pembangunan adaptif untuk	1. Pemenuhan substansi mandatori kebijakan pusat dan provinsi dalam dokumen perencanaan; 2. Penguatan usulan daerah dalam forum konsultsi perencanaan di tingkat provinsi dan nasional; 3. Penguatan koordinasi lintas OPD; 4. Penyusunan kebijakan pembangunan adaptif terhadap dinamika

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		menghadapi perubahan regulasi pusat; 5. Memperkuat koordinasi dan komunikasi antar OPD untuk menghindari duplikasi program	eksternal.
	Meningkatnya implementasi riset dan inovasi daerah dalam perencanaan pembangunan	1. Meningkatkan kualitas riset dan inovasi daerah; 2. Meningkatkan implementasi hasil riset dan inovasi dalam perencanaan pembangunan; 3. Mengoptimalkan jejaring dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan masyarakat untuk memperkuat kajian.	1. Penguatan penelitian dan kajian strategis pembangunan daerah; 2. Pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah; 3. Peningkatkan kolaborasi riset dan inovasi dengan *pentahelix* (pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, media); 4. Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam riset dan inovasi; 5. Pemenuhan kebutuhan SDM Peneliti.
	Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas OPD	Meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas OPD	1. Meningkatkan kualitas SDM melalui pengembangan kompetensi; 2. Meningkatkan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			3. Meningkatkan nilai SAKIP Bapperida Kabupaten Pemalang

3.3. Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida dalam jangka menengah, dirumuskan prioritas pembangunan tahunan yang disajikan pada tabel 3.4.

Tabel 3.4
Penahapan Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penataan sistem dan *baseline*	Peningkatan kapasitas dan kualitas substansi	Evaluasi dan inovasi (*mid-term review*)	Percepatan integrasi dan konsolidasi	Penyempurnaan dan transisi

Tahap I: Tahun 2026

Tahun 2026 adalah tahun pertama perencanaan Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 yang difokuskan pada **penataan sistem dan *baseline***. Tahun pertama ini merupakan landasan pijakan untuk tahun-tahun berikutnya. Untuk itu, perlu memastikan sistem, data, dan SDM siap sebelum masuk ke tahapan berikutnya.

Strategi:

a. Penguatan regulasi dan tata kelola perencanaan, yaitu memastikan bahwa penyusunan dokumen perencanaan memiliki dasar hukum dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas.
b. Penyusunan *baseline* data dan indikator kinerja pembangunan. Menetapkan titik awal (*baseline*) untuk semua indikator Renstra dan RPJMD.
c. Penguatan kapasitas perencana, baik perencana di Bapperida maupun OPD.
d. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi perencanaan.

Arah Kebijakan:

a. Menyusun pedoman teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
b. Menginventarisasi dan menetapkan *baseline* data indikator makro serta indikator sektoral.
c. Membangun/memperkuat database perencanaan daerah yang terintegrasi lintas OPD.

https://jdih.pemalangkab.go.id

d. Melaksanakan pelatihan teknis perencanaan bagi pejabat fungsional perencana di Bapperida maupun OPD.
e. Mengoperasionalkan sistem informasi perencanaan (SIPD) secara konsisten dan terstandar.
f. Menetapkan *quick wins* awal (program percontohan) yang mudah diukur untuk memperlihatkan capaian.

Tahap II: Tahun 2027

Penahapan ke-2 ini difokuskan pada **penguatan kapasitas dan substansi**. Hasil yang diharapkan adalah SDM perencana lebih kompeten, dokumen perencanaan lebih kuat secara substansi (tidak hanya formalitas), serta konsistensi dan keterpaduan lebih terjamin antara pemerintah pusat dan daerah maupun antar OPD.

Strategi:

a. Meningkatkan kapasitas SDM perencana melalui diklat, *workshop*, dan pendampingan teknis dalam penyusunan dokumen.
b. Memperkuat substansi dokumen perencanaan, dengan memastikan dokumen sesuai regulasi, berbasis data, dan selaras dengan RPJMN/RPJMD.
c. Memperdalam analisis *evidence-based planning* menggunakan data statistik, hasil riset, serta rekomendasi akademik.
d. Mendorong partisipasi publik dan inklusivitas, dengan memperluas keterlibatan masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan kelompok rentan dalam proses perencanaan.

Arah Kebijakan:

a. Melaksanakan pelatihan teknis penyusunan dokumen perencanaan berbasis data dan indikator kinerja.
b. Mengembangkan *knowledge management* perencanaan (pustaka digital, hasil riset, analisis kebijakan daerah).
c. Memastikan dokumen perencanaan tahunan (Renja, RKPD) konsisten dengan RPJMD dan Renstra OPD.
d. Memperkuat analisis ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata ruang dalam dokumen perencanaan.
e. Mengintegrasikan hasil riset dan inovasi daerah (kerja sama dengan perguruan tinggi/BRIDA/BRIN) ke dalam dokumen perencanaan.
f. Menyelenggarakan forum konsultasi publik, forum lintas OPD, dan musrenbang secara lebih inklusif & partisipatif.
g. Melakukan pendampingan pada OPD dalam penyusunan Renja agar selaras dan berkualitas.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tahap III: Tahun 2028

Tahapan ini difokuskan pada pelaksanaan **evaluasi pertengahan periode Renstra dan mulai mendorong inovasi** dalam perencanaan pembangunan agar lebih adaptif terhadap dinamika baru. Hasil yang diharapkan pada tahap ke-3 ini adalah dokumen perencanaan lebih adaptif dan responsif, inovasi mulai terintegrasi dalam proses perencanaan, dan ada perbaikan target dan strategi berdasarkan hasil evalusi pertengahan pelaksanaan Renstra/RPJMD.

Strategi:

a. Melaksanakan evaluasi pertengahan periode Renstra (*mid-term review*) untuk menilai capaian, kendala, dan penyesuaian target.
b. Mengembangkan inovasi perencanaan pembangunan, antara lain dengan penerapan metode baru, teknologi digital, dan integrasi riset.
c. Kolaborasi multipihak (*pentahelix*): pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat sipil, dan media.
d. Menguatkan perencanaan adaptif yang siap menghadapi perubahan lingkungan strategis (ekonomi, politik, sosial, teknologi, bencana).

Arah Kebijakan:

a. Melakukan evaluasi pertengahan periode Renstra Bapperida dan Renstra OPD untuk mengukur relevansi target.
b. Menyusun dokumen *review* RPJMD/Renstra jika ada perubahan kondisi strategis (misal pandemi, krisis ekonomi, atau perubahan regulasi pusat).
c. Mengintegrasikan hasil riset daerah, inovasi teknologi, dan rekomendasi akademisi ke dalam perencanaan pembangunan.
d. Mendorong pemanfaatan *big data*, analitik spasial, dan *dashboard monitoring* untuk memperkuat *evidence-based planning*.
e. Mengembangkan inovasi pelayanan publik dalam perencanaan, seperti musrenbang digital, konsultasi publik daring, atau *e-participation*.
f. Membangun kemitraan inovatif dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, sektor swasta, dan komunitas masyarakat.
g. Menetapkan *best practices* (praktik terbaik) dari pelaksanaan perencanaan sebelumnya untuk direplikasi pada sektor/OPD lain.

Tahap IV: Tahun 2029

Tahun 2029 difokuskan pada **percepatan integrasi dan konsolidasi**. Hasil yang diharapkan pada tahun ini adalah seluruh dokumen perencanaan terintegrasi dan konsisten, capaian target pembangunan optimal, serta ada warisan kebijakan dan inovasi untuk periode perencanaan berikutnya.

Strategi:

a. Mengintegrasikan seluruh dokumen perencanaan, untuk memastikan konsistensi RPJMD, Renstra OPD, RKPD, dan Renja OPD.

https://jdih.pemalangkab.go.id

b. Mendorong percepatan capaian target pembangunan terutama indikator yang masih rendah atau tertinggal.
c. Menguatkan konsolidasi antar OPD dan lintas sektor untuk mengurangi tumpang tindih program.
d. Meningkatkan tata kelola pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

Arah Kebijakan:

a. Menyusun dokumen akhir capaian Renstra dan konsolidasi ke dalam penyusunan RPJMD berikutnya.
b. Mengoptimalkan koordinasi lintas OPD dalam percepatan pencapaian program prioritas daerah.
c. Melakukan *final assessment* atas capaian indikator kinerja utama (IKU) daerah.
d. Mengembangkan sistem *dashboard* capaian pembangunan yang transparan dan bisa diakses publik.
e. Mendorong konsistensi antara rencana pembangunan, penganggaran (RKPD–KUA/PPAS–APBD), dan pelaporan kinerja.
f. Menyusun rekomendasi kebijakan dan inovasi untuk periode perencanaan berikutnya.
g. Meningkatkan akuntabilitas publik melalui publikasi capaian pembangunan (Laporan Kinerja, LAKIP, atau laporan pembangunan daerah).

Tahap V: Tahun 2030

Tahapan ini difokuskan pada **penyempurnaan dan transisi**. Dengan harapan capaian Renstra/RPJMD terdokumentasi lengkap, program prioritas berkelanjutan ke periode berikutnya, transisi pemerintahan/perencanaan berjalan mulus, serta tidak ada kehilangan data, informasi, maupun inovasi.

Strategi:

a. Menyempurnakan hasil pembangunan dengan menutup kesenjangan target yang belum tercapai.
b. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh capaian, kelemahan, dan pelajaran penting Renstra/RPJMD.
c. Menyiapkan transisi perencanaan dari RPJMD/Renstra lama ke periode berikutnya.
d. Memastikan keberlanjutan inovasi dan program prioritas agar tidak terputus saat pergantian periode pemerintahan.

Arah Kabijakan:

a. Menyusun *final report* capaian Renstra Bapperida maupun OPD yang berisi keberhasilan, kendala, dan rekomendasi.

https://jdih.pemalangkab.go.id

b. Menetapkan *legacy program* atau program unggulan yang harus diteruskan pada periode RPJMD berikutnya.
c. Melakukan harmonisasi dengan dokumen awal perencanaan jangka menengah periode baru (RPJPD/RPJMD/Renstra OPD).
d. Menyiapkan data dasar, indikator kinerja, dan sistem informasi untuk mendukung penyusunan perencanaan selanjutnya.
e. Melakukan penguatan kapasitas kelembagaan agar transisi berjalan mulus meskipun terjadi pergantian kepala daerah atau pejabat.
f. Menjamin keberlanjutan inovasi pelayanan publik dan perencanaan berbasis riset.
g. Menyusun rekomendasi strategis untuk isu-isu jangka panjang yang perlu ditangani oleh RPJMD berikutnya.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Penyusunan program mengacu kepada program yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai tugas dan fungsi. Bapperida Kabupaten Pemalang dalam menyusun rencana program, kegiatan, dan subkegiatan ini telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutkahirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perumusan program/kegiatan/subkegiatan disajikan pada Gambar 4.1 berikut.

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

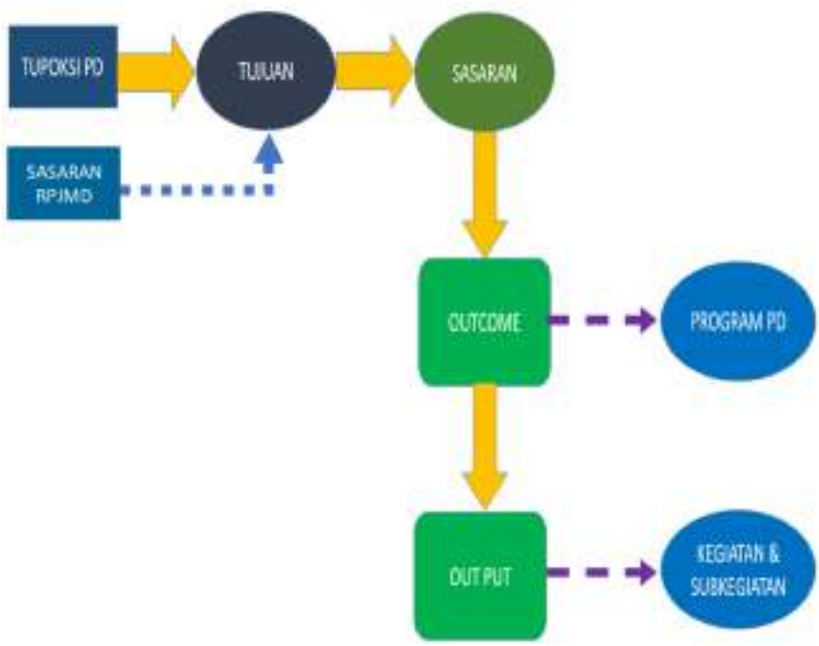

Sumber: Inmendagri No. 2 Tahun 202

https://jdih.pemalangkab.go.id

Penjabaran rencana program, kegiatan, subkegiatan, Bapperida Kabupaten Pemalang selama tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	-	-	-	Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP)	-	-
		Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan	-	-	Persentase keterpenuhan substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan regulasi	-	-
			Meningkatnya kualitas dokumen	-	1. Persentase Perangkat Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			perencanaan perangkat daerah		dengan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Meningkat 2. Persentase Perangkat Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Meningkat 3. Persentase Perangkat Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Meningkat		
				Meningkatnya kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Disusun	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Manusia			
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Rumpun Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Rumpun Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang Disusun	**Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam**	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Disusun	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
			Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah		Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Sesuai Regulasi	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	
				Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai regulasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Disusun	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Persentase Ketersediaan Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan	-	-	Persentase Keselarasan Program dengan Prioritas Daerah dan Prioritas Nasional	-	
			Meningkatnya keselarasan Program dengan Prioritas Daerah		1. Persentase Keselarasan Program dengan Prioritas Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Persentase Keselarasan Program dengan Prioritas Daerah Rumpun Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam 3. Persentase Keselarasan Program dengan Prioritas Daerah Rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Pogram Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kualitas monev penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase laporan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan rumpun bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Sesuai Regulasi	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	
					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				Meningkatnya kualitas monev penyusunan dokumen perencanaan bidang ekonomi dan sumber daya alam	Persentase laporan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan rumpun bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sesuai Regulasi	**Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam**	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
				Meningkatnya kualitas monev penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase laporan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan rumpun bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Sesuai Regulasi	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
			Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi		**Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi yang sesuai regulasi**	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	
					Jumlah dokumen evaluasi yang sesuai regulasi	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya implementasi riset dan inovasi daerah dalam perencanaan pembangunan			Indeks Inovasi Daerah		
			Meningkatnya kualitas riset dan inovasi daerah		1. Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan pembangunan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah 2. Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	**Program Riset dan Inovasi Daerah**	
				Terfasilitasinya kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan	Persentase fasilitasi kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	**Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
				Terfasilitasinya kegiatan invensi dan inovasi	Persentase fasilitasi kegiatan invensi dan inovasi	**Invensi dan Inovasi**	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI dan fasilitas perlindungan KI)	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	
					Laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	
					Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	
					Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah			1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota		1. Persentase Layanan Umum dan Kepagawaian yang Terpenuhi 2. Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan, dan Evaluasi Kinerja Disuusn Sesuai Regulasi	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya administrasi barang milik daerah sesuai regulasi	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah yang Disusun Sesuai Regulasi	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya administrasi kepegawaian sesuai regulasi	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Sesuai Regulasi	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya fasilitasi administrasi umum perangkat daerah sesuai regulasi	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan Sesuai Regulasi	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya barang milik daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang Sesuai Regulasi	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Regulasi	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya administrasi keuangan sesuai dengan regulasi	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Regulasi	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		

https://jdih.pemalangkab.go.id

Rencana program, kegiatan, dan subkegiatan berikut pendanaannya merupakan tindka lanjut dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.2

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi**	**%**		**100**	**Rp1.557.350.300**	**100**	**Rp3.082.044.491**	**100**	**Rp3.082.044.491**	**100**	**Rp3.082.044.491**	**100**	**Rp3.082.044.491**	
	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan, dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi	%		**100**	**Rp6.288.764.700**	**100**	**Rp6.741.968.000**	**100**	**Rp6.741.968.000**	**100**	**Rp6.741.968.000**	**100**	**Rp6.741.968.000**	
5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Regulasi	Dokumen		2	Rp9.691.500	2	Rp23.210.000	2	Rp23.210.000	2	Rp23.210.000	3	Rp23.210.000	
5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	Rp3.874.000	2	Rp4.145.000	2	Rp4.145.000	2	Rp4.145.000	3	Rp4.145.000	
5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	Rp0	1	Rp3.210.000	1	Rp3.210.000	1	Rp3.210.000	1	Rp3.210.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	Rp0	1	Rp3.210.000	1	Rp3.210.000	1	Rp3.210.000	1	Rp3.210.000	
5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	Rp0	1	Rp3.210.000	1	Rp3.210.000	1	Rp3.210.000	1	Rp3.210.000	
5.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	Rp0	1	Rp3.210.000	1	Rp3.210.000	1	Rp3.210.000	1	Rp3.210.000	
5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	Rp3.317.500	1	Rp3.550.000	1	Rp3.550.000	1	Rp3.550.000	1	Rp3.550.000	
5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	Rp2.500.000	4	Rp2.675.000	4	Rp2.675.000	5	Rp2.675.000	4	Rp2.675.000	
5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Regulasi	Dokumen	100	100	Rp6.279.073.200	100	Rp6.718.758.000	100	Rp6.718.758.000	100	Rp6.718.758.000	100	Rp6.718.758.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	32	41	Rp6.272.864.000	41	Rp6.712.114.000	41	Rp6.712.114.000	41	Rp6.712.114.000	41	Rp6.712.114.000	
5.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	Rp2.025.000	12	Rp2.167.000	12	Rp2.167.000	12	Rp2.167.000	12	Rp2.167.000	
5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	Rp1.699.200	1	Rp1.818.000	1	Rp1.818.000	1	Rp1.818.000	1	Rp1.818.000	
5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12	Rp1.880.000	12	Rp2.012.000	12	Rp2.012.000	12	Rp2.012.000	12	Rp2.012.000	
5.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	2	Rp605.000	2	Rp647.000	2	Rp647.000	2	Rp647.000	2	Rp647.000	
5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Regulasi	Dokumen	100	100	Rp713.000	100	Rp6.114.491	100	Rp6.114.491	100	Rp6.114.491	100	Rp6.114.491	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	Rp363.000	1	Rp389.491	1	Rp389.491	1	Rp389.491	1	Rp389.491	
5.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	12	12	Rp0	12	Rp5.350.000	12	Rp5.350.000	12	Rp5.350.000	12	Rp5.350.000	
5.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	Rp350.000	2	Rp375.000	2	Rp375.000	2	Rp375.000	2	Rp375.000	
5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Sesuai Regulasi	%	100	100	Rp0	100	Rp101.652.000	100	Rp101.652.000	100	Rp101.652.000	100	Rp101.652.000	
5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	1	Rp0	1	Rp1.070.000	1	Rp1.070.000	1	Rp1.070.000	1	Rp1.070.000	
5.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	12	Rp0	12	Rp12.840.000	12	Rp12.840.000	12	Rp12.840.000	12	Rp12.840.000	
5.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	12	Rp0	12	Rp12.840.000	12	Rp12.840.000	12	Rp12.840.000	12	Rp12.840.000	
5.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	60	70	Rp0	70	Rp0	70	Rp0	70	Rp0	70	Rp0	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	60	70	Rp0	70	Rp74.902.000	70	Rp74.902.000	70	Rp74.902.000	70	Rp74.902.000	
5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan Sesuai Regulasi	%	100	100	Rp541.373.800	100	Rp579.282.000	100	Rp579.282.000	100	Rp579.282.000	100	Rp579.282.000	
5.01.01.2.06.0001 Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	Rp11.915.000	4	Rp12.749.000	4	Rp12.749.000	4	Rp12.749.000	4	Rp12.749.000	
5.01.01.2.06.0002 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	Rp38.411.300	4	Rp41.101.000	4	Rp41.101.000	4	Rp41.101.000	4	Rp41.101.000	
5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4	Rp23.570.000	4	Rp25.220.000	4	Rp25.220.000	4	Rp25.220.000	4	Rp25.220.000	
5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	Rp163.700.000	4	Rp175.163.000	4	Rp175.163.000	4	Rp175.163.000	4	Rp175.163.000	
5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	Rp20.427.500	4	Rp21.858.000	4	Rp21.858.000	4	Rp21.858.000	4	Rp21.858.000	
5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	4	Rp12.000.000	4	Rp12.840.000	4	Rp12.840.000	4	Rp12.840.000	4	Rp12.840.000	
5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	Rp52.500.000	12	Rp56.176.000	12	Rp56.176.000	12	Rp56.176.000	12	Rp56.176.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	Rp216.850.000	12	Rp232.035.000	12	Rp232.035.000	12	Rp232.035.000	12	Rp232.035.000	
5.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	2	Rp2.000.000	2	Rp2.140.000	2	Rp2.140.000	2	Rp2.140.000	2	Rp2.140.000	
5.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	Rp0	1	Rp0	1	Rp0	1	Rp0	1	Rp0	
5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	%	100	100	Rp19.600.000	100	Rp1.270.760.000	100	Rp1.270.760.000	100	Rp1.270.760.000	100	Rp1.270.760.000	
5.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	10	Rp0	10	Rp1.142.786.000	10	Rp1.142.786.000	10	Rp1.142.786.000	10	Rp1.142.786.000	
5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	22	40	Rp12.000.000	40	Rp12.840.000	40	Rp12.840.000	40	Rp12.840.000	40	Rp12.840.000	
5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	40	Rp7.600.000	40	Rp8.132.000	40	Rp8.132.000	40	Rp8.132.000	40	Rp8.132.000	
5.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	1	Rp0	1	Rp107.002.000	1	Rp107.002.000	1	Rp107.002.000	1	Rp107.002.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	%	100	100	Rp715.154.500	100	Rp765.232.000	100	Rp765.232.000	100	Rp765.232.000	100	Rp765.232.000	
5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	Rp1.027.500	12	Rp1.099.000	12	Rp1.099.000	12	Rp1.099.000	12	Rp1.099.000	
5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	Rp228.007.000	12	Rp243.973.000	12	Rp243.973.000	12	Rp243.973.000	12	Rp243.973.000	
5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	Rp486.120.000	12	Rp520.160.000	12	Rp520.160.000	12	Rp520.160.000	12	Rp520.160.000	
5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	%	100	100	Rp280.509.000	100	Rp359.004.000	100	Rp359.004.000	100	Rp359.004.000	100	Rp359.004.000	
5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	29	29	Rp227.675.000	35	Rp243.618.000	35	Rp243.618.000	35	Rp243.618.000	35	Rp243.618.000	
5.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	200	200	Rp0	200	Rp32.101.000	200	Rp32.101.000	200	Rp32.101.000	200	Rp32.101.000	
5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	40	40	Rp38.994.000	40	Rp41.725.000	40	Rp41.725.000	40	Rp41.725.000	40	Rp41.725.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	Rp13.840.000	2	Rp14.809.000	2	Rp14.809.000	2	Rp14.809.000	2	Rp14.809.000	
5.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	5	Rp0	5	Rp26.751.000	5	Rp26.751.000	5	Rp26.751.000	5	Rp26.751.000	
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Sesuai Regulasi**	**%**	**100**	**100**	**Rp263.374.500**	**100**	**Rp1.559.265.650**	**100**	**Rp1.559.265.650**	**100**	**Rp1.559.265.650**	**100**	**Rp2.400.000.000**	
	Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi yang sesuai regulasi	**%**	**100**	**100**	**Rp33.375.500**	**100**	**Rp100.000.000**	**100**	**Rp100.000.000**	**100**	**Rp100.000.000**	**100**	**Rp259.265.650**	
5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Disusun	Dokumen		2	Rp233.854.500	2	Rp1.100.265.650	2	Rp1.100.265.650	2	Rp1.100.265.650	3	Rp1.850.000.000	
5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	3	3	Rp23.487.000	3	Rp100.000.000	3	Rp100.000.000	3	Rp100.000.000	4	Rp200.000.000	
5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	1	Rp66.893.500	1	Rp250.000.000	1	Rp250.000.000	1	Rp250.000.000	2	Rp400.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	4	4	Rp143.474.000	4	Rp750.265.650	4	Rp750.265.650	5	Rp750.265.650	6	Rp1.250.000.000	
5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	%		100	Rp29.520.000	100	Rp459.000.000	100	Rp459.000.000	100	Rp459.000.000	100	Rp550.000.000	
5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen		1	Rp19.520.000	1	Rp300.000.000	1	Rp300.000.000	1	Rp300.000.000	1	Rp350.000.000	
5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku		1	Rp10.000.000	1	Rp159.000.000	1	Rp159.000.000	1	Rp159.000.000	1	Rp200.000.000	
5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang sesuai regulasi	Dokumen		1	Rp33.375.500	1	Rp100.000.000	1	Rp100.000.000	2	Rp100.000.000	1	Rp259.265.650	
5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan		4	Rp33.375.500	4	Rp100.000.000	4	Rp100.000.000	5	Rp100.000.000	4	Rp259.265.650	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Meningkat	%		100	Rp184.497.000	100	Rp308.946.700	100	Rp114.310.279	100	Rp114.310.279	100	Rp114.310.279	
	Persentase Perangkat Daerah Rumpun Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Meningkat	%		100	Rp105.000.000	100	Rp140.000.000	100	Rp52.000.000	100	Rp52.000.000	100	Rp52.000.000	
	Persentase Perangkat Daerah Rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Meningkat	%		100	Rp100.000.000	100	Rp360.000.000	100	Rp95.000.000	100	Rp95.000.000	100	Rp95.000.000	
	Persentase Keselarasan Program dengan Prioritas Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%		100	Rp115.503.000	100	Rp290.983.600	100	Rp113.526.998	100	Rp113.526.998	100	Rp113.526.998	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Keselarasan Program dengan Prioritas Daerah Rumpun Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	**%**		**100**	**Rp95.000.000**	**100**	**Rp122.469.506**	**100**	**Rp47.678.808**	**100**	**Rp47.678.808**	**100**	**Rp47.678.808**	
	Persentase Keselarasan Program dengan Prioritas Daerah Rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**%**		**100**	**Rp150.000.000**	**100**	**Rp389.912.874**	**100**	**Rp189.796.595**	**100**	**Rp189.796.595**	**100**	**Rp189.796.595**	
5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Disusun	Dokumen	100	100	Rp300.000.000	100	Rp599.930.300	100	Rp227.837.277	100	Rp227.837.277	100	Rp227.837.277	
5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	2	Rp68.854.000	2	Rp75.739.400	2	Rp28.023.578	2	Rp28.023.578	3	Rp28.023.578	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	16	16	Rp115.643.000	16	Rp127.207.300	16	Rp47.066.701	16	Rp47.066.701	24	Rp47.066.701	
5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	8	8	Rp0	8	Rp53.000.000	8	Rp19.610.000	8	Rp19.610.000	8	Rp19.610.000	
5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	3	3	Rp115.503.000	3	Rp129.553.300	3	Rp50.834.721	3	Rp50.834.721	3	Rp50.834.721	
5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	2	Rp0	2	Rp53.000.000	2	Rp19.610.000	2	Rp19.610.000	3	Rp19.610.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	8	8	Rp0	8	Rp53.000.000	8	Rp19.610.000	8	Rp19.610.000	12	Rp19.610.000	
5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	4	4	Rp0	4	Rp53.000.000	4	Rp19.610.000	8	Rp19.610.000	4	Rp19.610.000	
5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	5	5	Rp0	5	Rp55.430.300	5	Rp23.472.277	5	Rp23.472.277	5	Rp23.472.277	
5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Rumpun Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang Disusun	Dokumen	100	100	Rp200.000.000	100	Rp262.469.506	100	Rp99.678.808	100	Rp99.678.808	100	Rp99.678.808	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	2	Rp45.000.000	2	Rp70.000.000	2	Rp26.000.000	2	Rp26.000.000	3	Rp26.000.000	
5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	18	12	Rp60.000.000	12	Rp70.000.000	12	Rp26.000.000	12	Rp26.000.000	18	Rp26.000.000	
5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	32	24	Rp0	24	Rp32.000.000	24	Rp13.000.000	24	Rp13.000.000	24	Rp13.000.000	
5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	16	12	Rp95.000.000	12	Rp90.469.506	12	Rp34.678.808	12	Rp34.678.808	12	Rp34.678.808	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Disusun	Dokumen		100	Rp250.000.000	100	Rp749.912.874	100	Rp284.796.595	100	Rp284.796.595	100	Rp284.796.595	
5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen		2	Rp30.000.000	2	Rp60.000.000	2	Rp25.000.000	2	Rp25.000.000	3	Rp25.000.000	
5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan		10	Rp30.000.000	10	Rp160.000.000	10	Rp30.000.000	10	Rp30.000.000	15	Rp30.000.000	
5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan		4	Rp30.000.000	4	Rp80.000.000	4	Rp30.000.000	8	Rp30.000.000	4	Rp30.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan		3	Rp80.000.000	3	Rp80.000.000	3	Rp80.000.000	3	Rp80.000.000	3	Rp80.000.000	
5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen		2	Rp20.000.000	2	Rp70.000.000	2	Rp20.000.000	2	Rp20.000.000	3	Rp20.000.000	
5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan		28	Rp20.000.000	28	Rp70.000.000	28	Rp20.000.000	28	Rp20.000.000	42	Rp20.000.000	
5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan		14	Rp20.000.000	14	Rp160.000.000	14	Rp60.000.000	28	Rp60.000.000	14	Rp60.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan		1	Rp20.000.000	1	Rp69.912.874	1	Rp19.796.595	1	Rp19.796.595	1	Rp19.796.595	
5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	**Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan pembangunan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah**	**%**		**100**	**Rp0**	**100**	**Rp120.000.000**	**100**	**Rp207.865.070**	**100**	**Rp207.865.070**	**100**	**Rp207.865.070**	
	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	%		**100**	**Rp250.000.000**	**100**	**Rp477.865.070**	**100**	**Rp390.000.000**	**100**	**Rp390.000.000**	**100**	**Rp390.000.000**	
5.05.03.2.01 Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Persentase fasilitasi kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	%		100	Rp0	100	Rp120.000.000	100	Rp207.865.070	100	Rp207.865.070	100	Rp207.865.070	
5.05.03.2.01.0003 Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan		1	Rp0	2	Rp120.000.000	2	Rp207.865.070	2	Rp207.865.070	2	Rp207.865.070	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.05.03.2.02 Invensi dan Inovasi	Persentase fasilitasi kegiatan invensi dan inovasi	%		100	Rp250.000.000	100	Rp477.865.070	100	Rp390.000.000	100	Rp390.000.000	100	Rp390.000.000	
5.05.03.2.02.0002 Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Laporan		2	Rp75.000.000	2	Rp85.000.000	2	Rp85.000.000	2	Rp85.000.000	2	Rp85.000.000	
5.05.03.2.02.0006 Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI dan fasilitas perlindungan KI)	Laporan		8	Rp15.000.000	10	Rp15.000.000	12	Rp15.000.000	14	Rp15.000.000	16	Rp15.000.000	
5.05.03.2.02.0007 Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Laporan		3	Rp15.000.000	3	Rp15.000.000	3	Rp15.000.000	3	Rp15.000.000	3	Rp15.000.000	
5.05.03.2.02.0009 Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Kegiatan		30	Rp75.000.000	30	Rp75.000.000	30	Rp75.000.000	30	Rp75.000.000	30	Rp75.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.05.03.2.02.0010 Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Laporan		8	Rp20.000.000	10	Rp120.000.000	12	Rp120.000.000	14	Rp120.000.000	16	Rp120.000.000	
5.05.03.2.02.0013 Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	unit		1	Rp0	1	Rp117.865.070	1	Rp30.000.000	1	Rp30.000.000	1	Rp30.000.000	
5.05.03.2.02.0016 Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan		2	Rp50.000.000	2	Rp50.000.000	2	Rp50.000.000	2	Rp50.000.000	2	Rp50.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, diperlukan penajaman fokus terhadap program program dan kegiatan yang bersifat prioritas. Program prioritas merupakan program strategis yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program prioritas tersebut, diperlukan identifikasi dan analisis terhadap subkegiatan yang menjadi komponen utama dalam operasionalisasi program. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap subkegiatan yang direncanakan benar-benar relevan, selaras, dan memiliki kontribusi nyata terhadap capaian program pembangunan.

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah merupakan program prioritas yang bertujuan untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinkron, terintegrasi serta berbasis data dan informasi yang akurat. Melalui program ini, BAPPERIDA mendorong terciptanya dokumen perencanaan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu menjamin pelaksanaan pembangunan yang tepat sasaran dan efisien. Selanjutnya, kegiatan/subkegiatan yang mendukung program tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai regulasi; 2. Persentase dokumen evaluasi yang sesuai regulasi	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten/Kota	
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida berfungsi sebagai alat ukur utama dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan peran strategis lembaga dalam mendukung pembangunan daerah. Penyusunan IKU mengacu pada sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga capaian indikator tidak hanya mencerminkan kinerja internal lembaga, tetapi juga kontribusi terhadap pembangunan daerah. Untuk itu pada Tabel 4.3 berikut ditampilkan IKU BAPPERIDA beserta targetnya.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Bapperida Kabupaten Pemalang

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP) Daerah	Indeks	84,3770	84,5645	84,9395	85,5645	85,7520	85,9395	
2	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	50,61	53	55	57	59	61	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87,18	87,48	87,78	88,08	88,38	88,68	
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,80	69,40	70,00	70,60	71,20	71,80	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. Sebagai Perangkat daerah yang menyelenggarakan Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan, IKK BAPPERIDA difokuskan pada *persentase keterpenuhan substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan regulasi.* Indikator ini dipilih karena kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai aturan menjadi dasar penting dalam mewujudkan pembangunan yang terarah, terukur, dan akuntabel. Melalui pengukuran indikator ini, BAPPERIDA dapat memastikan bahwa seluruh dokumen perencanaan, baik tahunan maupun jangka menengah, disusun tepat waktu, sesuai substansi, serta memenuhi ketentuan perundang-undangan. Hal ini diharapkan berdampak pada meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan visi, misi, dan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.

Selain itu BAPPERIDA juga menyelenggarakan urusan penelitian dan pengembangan. IKK yang digunakan untuk mengukur sejauh mana hasil kajian berbasis bukti (*evidence-based policy research*) yang dilaksanakan oleh BAPPERIDA dapat dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan daerah adalah *persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan pembangunan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah.* Indikator ini menekankan pentingnya penelitian dan pengembangan yang relevan, metodologis, serta mampu memberikan rekomendasi yang aplikatif untuk menjawab permasalahan nyata pembangunan daerah. Pemanfaatan kajian dalam kebijakan pembangunan menunjukkan bahwa hasil Litbang tidak hanya berhenti sebagai dokumen teknis, melainkan benar-benar menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, perumusan program, dan penyusunan strategi pembangunan. Semakin tinggi persentase pemanfaatan kajian dalam kebijakan daerah, semakin kuat pula peran BAPPERIDA sebagai lembaga yang mendorong perencanaan pembangunan berbasis data, analisis, dan bukti ilmiah. Pada tabel 4.5 berikut ditampilkan IKK BAPPERIDA.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase keterpenuhan substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan regulasi	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan pembangunan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB V
PENUTUP

Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida Kabupaten Pemalang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Renstra menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, yang dijadikan sebagai acuan kinerja dan ukuran keberhasilan bagi Bapperida.

Penyusunan Renstra Bapperida dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai di tahun 2029. Oleh sebab itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai Bapperida agar melaksanakan Program, Kegiatan, Subkegiatan dan mendukung pencapaian target Renstra.
2. Bapperida agar menjalin koordinasi dan kerja sama yang baik dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Bapperida yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan maka penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan/atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Bapperida sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil Program serta Kegiatan Renstra secara berkala.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Bapperida Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN :

POHON KINERJA BAPPERIDA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029

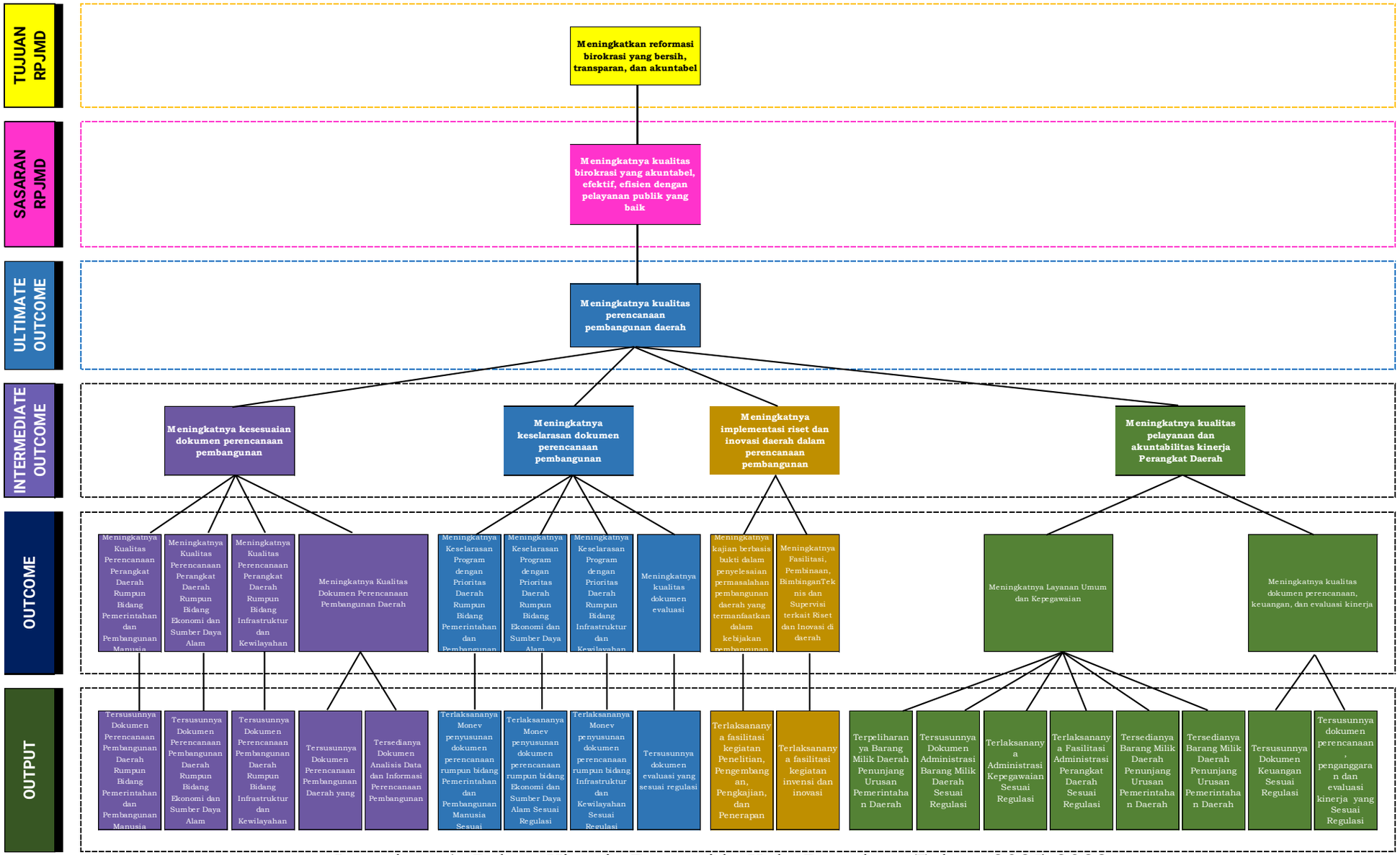

Lampiran 1. Pohon Kinerja Bapperida Kab. Pemalang Tahun 2025-2029

https://jdih.pemalangkab.go.id

CASCADING BAPPERIDA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029

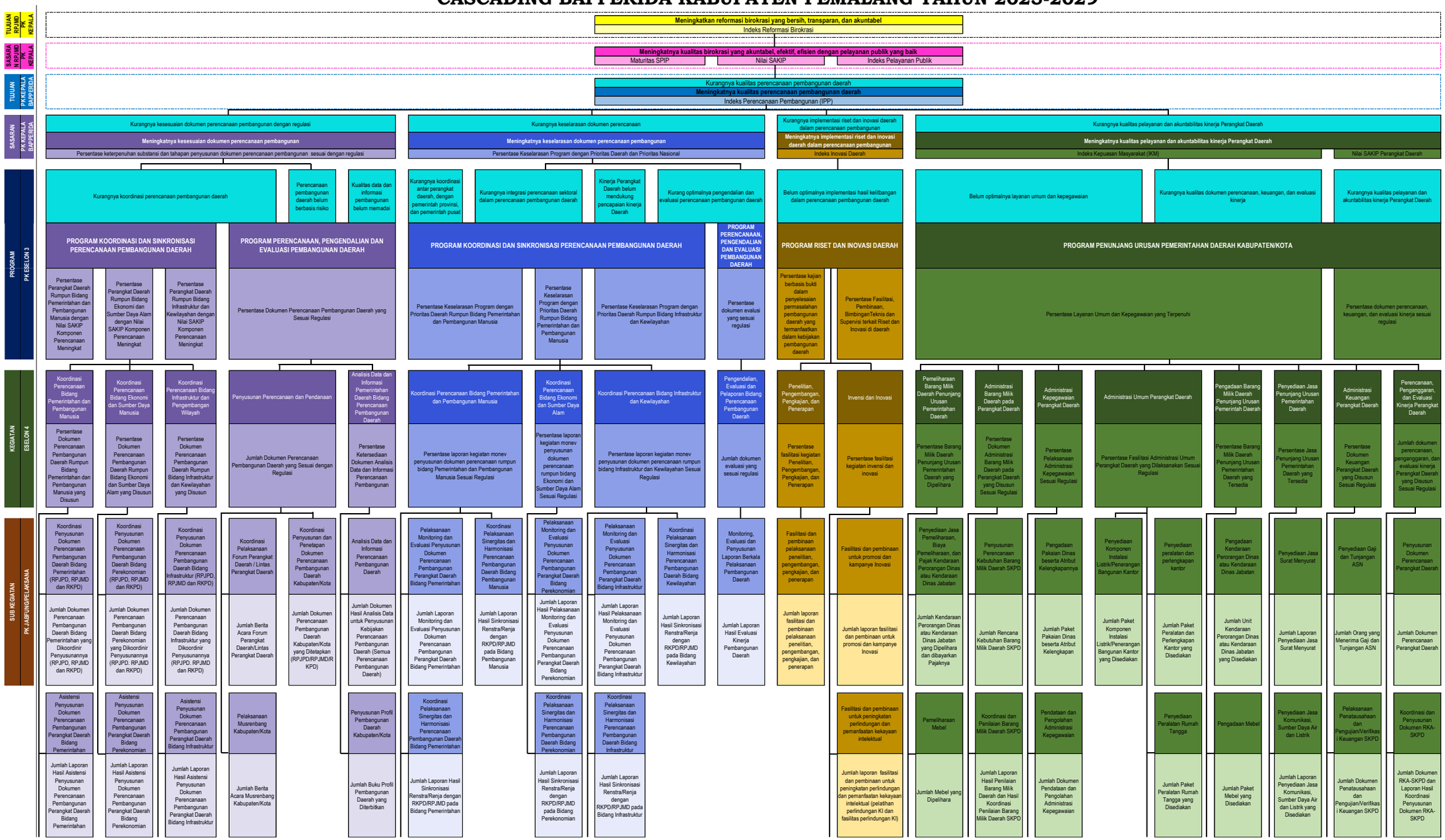

https://jdih.pemalangkab.go.id

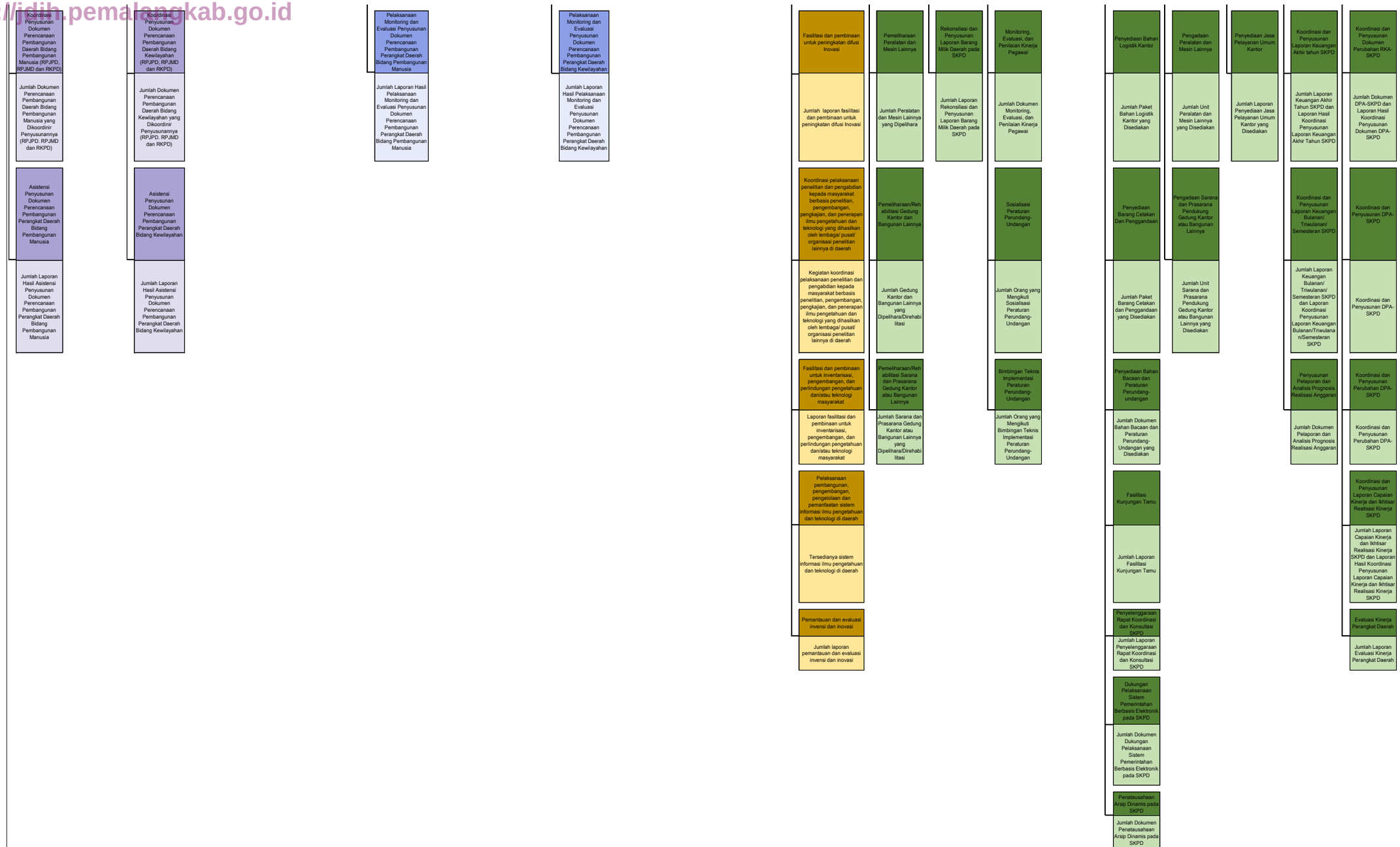

Lampiran 2. Cascading Bapperida Kab. Pemalang Tahun 2025-2029

https://djh.pemalangkab.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kualitas perencanaan dan penganggaran yang baik adalah perencanaan dan penganggaran yang mampu mengimplementasikan tiga prinsip utama pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

1. Disiplin Fiskal yaitu prinsip untuk mengontrol kebijakan fiskal daerah secara konsisten;
2. Efisiensi Alokasi yaitu prinsip memastikan anggaran dialokasikan secara efektif dan efisien guna mencapai manfaat yang besar dari ketersediaan dana yang terbatas, dan
3. Efisiensi teknis dan operasional yaitu memastikan pelaksanaan anggaran, dengan meminimalkan biaya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

Perencanaan dan penganggaran yang baik, efektif dan efisien dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang berkelanjutan. Pemerintah telah menerbitkan regulasi terbaru terkait pengelolaan keuangan daerah yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Regulasi ini mengatur tentang tata Kelola Keuangan Daerah yang memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya sekaligus memberikan tanggungjawab yang lebih terhadap konsekuensi pencapaian target yang ditetapkan. Dalam rangka mendukung transparansi, akuntabilitas serta *good governance* pada Pemerintah Daerah maka implementasi transaksi keuangan secara non tunai menjadi keharusan bagi para pengelola keuangan daerah. Dalam pengelolaan pendapatan, implementasi transaksi non tunai dilaksanakan melalui *e*_retribusi, laku pandai serta saluran non tunai lainnya. Dalam pengelolaan keuangan daerah, semua transaksi uang daerah diwajibkan menggunakan mekanisme non tunai. Pemerintah Daerah mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk semua pelaksanaan APBD. Sebagaimana amanat yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu, Pengelolaan barang milik daerah juga didorong untuk transparan dan akuntabel khususnya terkait penerimaan pendapatan sewa barang milik daerah. Pegawai yang menangani sewa barang milik daerah dilarang menerima tunai dari penyewa. Masyarakat yang telah disetujui sebagai penyewa wajib menyetorkan biaya sewa yang disepakati ke RKUD Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Selain regulasi pengelolaan keuangan, terdapat regulasi terkait perencanaan yaitu Undang-undang Nomor Tahun 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Pada regulasi tersebut diamanatkan kepada perangkat daerah untuk menyusun rencana strategis perangkat daerah. Renstra merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

BPKPAD merupakan perangkat daerah yang merupakan peleburan dari BPKAD dengan BAPENDA berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi dan .....Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada bidang keuangan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang memiliki kewajiban untuk menyusun rencana strategis, sebagaimana ketentuan yang tercantum pada Pasal 11 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Rencana Strategis BPKPAD disusun sebagai pedoman dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta urusan yang diampu oleh BPKPAD Kabupaten Pemalang.

Pelaksanaan kebijakan pemilihan kepala daerah secara serentak yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 untuk periode kepemimpinan 2025-2030 berimplikasi pada penyesuaian rencana pembangunan daerah jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Pemalang, yang menjadi acuan dalam penyusunan renstra dan juga penyusunan renja Perangkat Daerah. Menimbang pada kondisi sebagaimana dimaksud diatas, pemerintah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 serta mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat mempengaruhi kebijakan dan strategi dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah. Dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah diharapkan mampu menjawab tantangan dalam hal pengelolaan keuangan, pengelolaan pendapatan dan pengelolaan aset daerah serta menggambarkan secara detil kinerja BPKPAD Kabupaten Pemalang beserta target kinerja yang akan di capai dalam 5 tahun ke depan.

Penetapan target Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah pada Renstra BPKPAD Tahun 2025-2029 merupakan hasil evaluasi indikator kinerja, capaian, masalah dan kendala yang dihadapi pada Renstra BPKAD Tahun 2021-2026 dan Renstra BAPENDA Tahun 2021-2026. IKU BPKPAD Tahun 2025-2029 lebih mempertimbangkan *corebisnis* pada masing-masing bidang dan amanat regulasi pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah. IKU pada Renstra BPKPAD Tahun 2025-2029, mengutamakan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang didukung dengan peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah dan peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah. Pengelolaan aset daerah secara komprehensif dari sisi pengamanan, pemanfaatan, penggunaan dan penghapusan, diharapkan dapat memberikan dampak positif pada peningkatan PAD yang signifikan. Pengelolaan aset daerah yang bersinergi dengan pengelolaan pendapatan daerah merupakan tonggak akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, pengelolaan aset daerah dan pengelolaan pendapatan daerah telah menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan *Monitoring Center Survaillance for Prevention (MCSP).*

Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah diselaraskan dengan rencana Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerjanya serta target yang harus dicapai selama kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Dalam mencapai kinerja yang ditargetkan, BPKPAD melaksanakan program pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah dan program pengelolaan barang milik daerah,

https://jdih.pemalangkab.go.id

selain program penunjang yang mendukung operasional kesekretariatan BPKPAD.

Hubungan kinerja antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah dengan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang tergambar pada Gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah

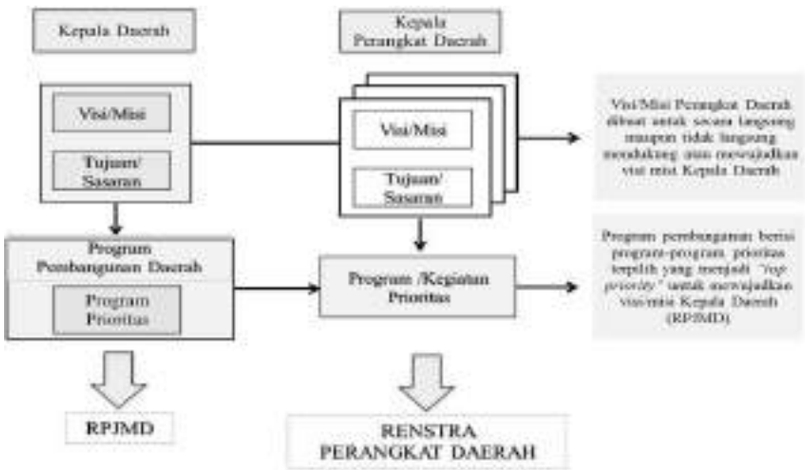

Selaras dengan gambar 1.1 tersebut maka renstra perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan yang menterjemahkan visi, misi, tujuan daerah dan sasaran daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah serta dilaksanakan dengan program/kegiatan/sub kegiatan pada masing-masing perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Penyusunan Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Gambar 1.2
Mekanisme Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

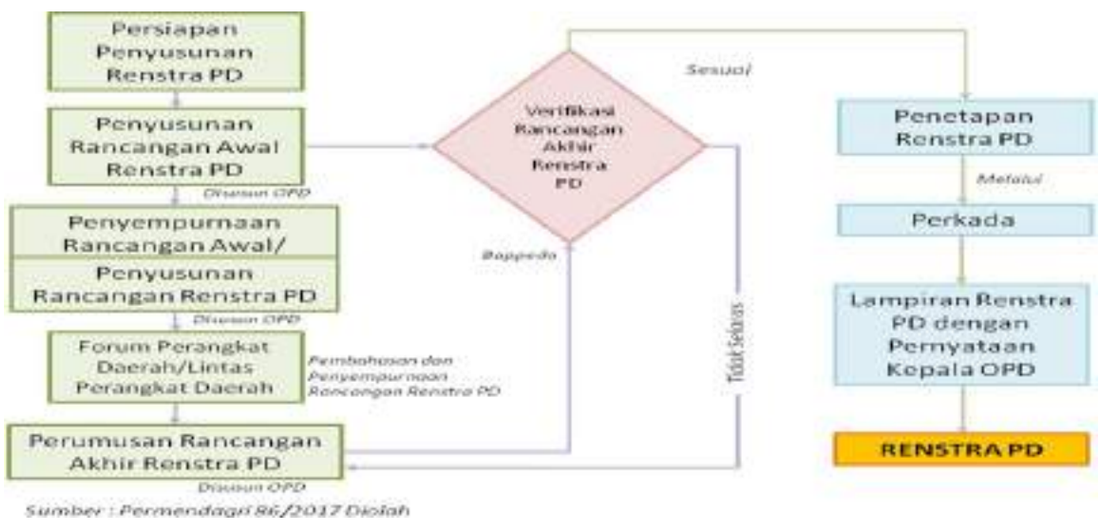

Sumber : Permendagri 86/2017 Diolah

https://jdih.pemalangkab.go.id

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Strategis BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 ini adalah :

1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6 UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);
10 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
11 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

https://jdih.pemalangkab.go.id

12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
15 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85);
16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;

https://jdih.pemalangkab.go.id

23 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
24 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
25 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
26 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
27 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1);
28 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14).
29 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7);
30 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan dalam mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah;
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan unsur penunjang bidang keuangan;
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra BPKPAD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3. Maksud dan Tujuan
Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan
Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BPKPAD KABUPATEN PEMALANG

2.1 Gambaran Pelayanan BPKAD Kabupaten Pemalang

Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik.

Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang untuk 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU dan indikator kinerja kunci (IKK).

Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya (bukan menarasikan data).

Dalam Bab II juga disajikan data sebagai berikut:

a. Tugas, fungsi dan struktur BPKPAD;
b. Sumber daya BPKPAD;
c. Kinerja penyelenggaraan pelayanan BPKPAD;
d. Kelompok sasaran pelayanan BPKPAD;
e. Mitra BPKPAD dalam pemberian pelayanan;
f. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja BPKPAD; dan
g. Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab BPKPAD.

Identifikasi yang berkaitan dengan pelayanan BPKPAD ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh BPKPAD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam subbab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis BPKPAD Kabupaten Pemalang

Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi BPKPAD baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Merumuskan isu strategis daerah yang disimpulkan dari:

a. permasalahan;
b. isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional); dan
c. potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang

Tujuan dan Sasaran Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 penentuannya didasarkan pada:

a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya; dan
b. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Tujuan dan Sasaran mempertimbangkan kondisi BPKPAD Kabupaten Pemalang yang ada saat ini.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra BPKPAD.

Arah Kebijakan Renstra BPKPAD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi BPKPAD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra BPKPAD.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, kegiatan dan subkegiatan

Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output.

Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

4.2 Dukungan Program Prioritas Daerah

Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja BPKPAD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Menyampaikan tentang kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan serta pelaksanaan pengendalian evaluasi dan harapan yang ingin dicapai berdasarkan dokumen renstra yang disusun.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BPKPAD KABUPATEN PEMALANG

2.1. Gambaran Pelayanan BPKPAD Kabupaten Pemalang

Gambaran pelayanan dijelaskan melalui analisis indikator capaian kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan periode sebelumnya, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dan dinilai perlu diatasi di masa mendatang. Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) merupakan perangkat daerah yang memberikan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan dukungan struktur organisasi terdiri atas Kepala Badan, Sekretariat dan 5 (Lima) Bidang yaitu: Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan dan Pengendalian serta Bidang Aset Daerah.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPKPAD

2.1.1.1. Tugas

Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14). Sedangkan tugas Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang yang tercantum pada Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. BPKPAD merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

2.1.1. 2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah sebagai perangkat daerah yang berbentuk badan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya ;
b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya ;

https://jdih.pemalangkab.go.id

d. Pelaksanaan Administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3. Struktur Organisasi BPKPAD

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun terdiri dari :

1. Kepala BPKPAD
2. Sekretaris
3. Kepala Bidang Anggaran
4. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
5. Kepala Bidang Aset Daerah
6. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan
7. Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian

Adapun Gambaran struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Gambar 2.1

Struktur Organisasi BPKPAD Kabupaten Pemalang

(Dasar : Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023)

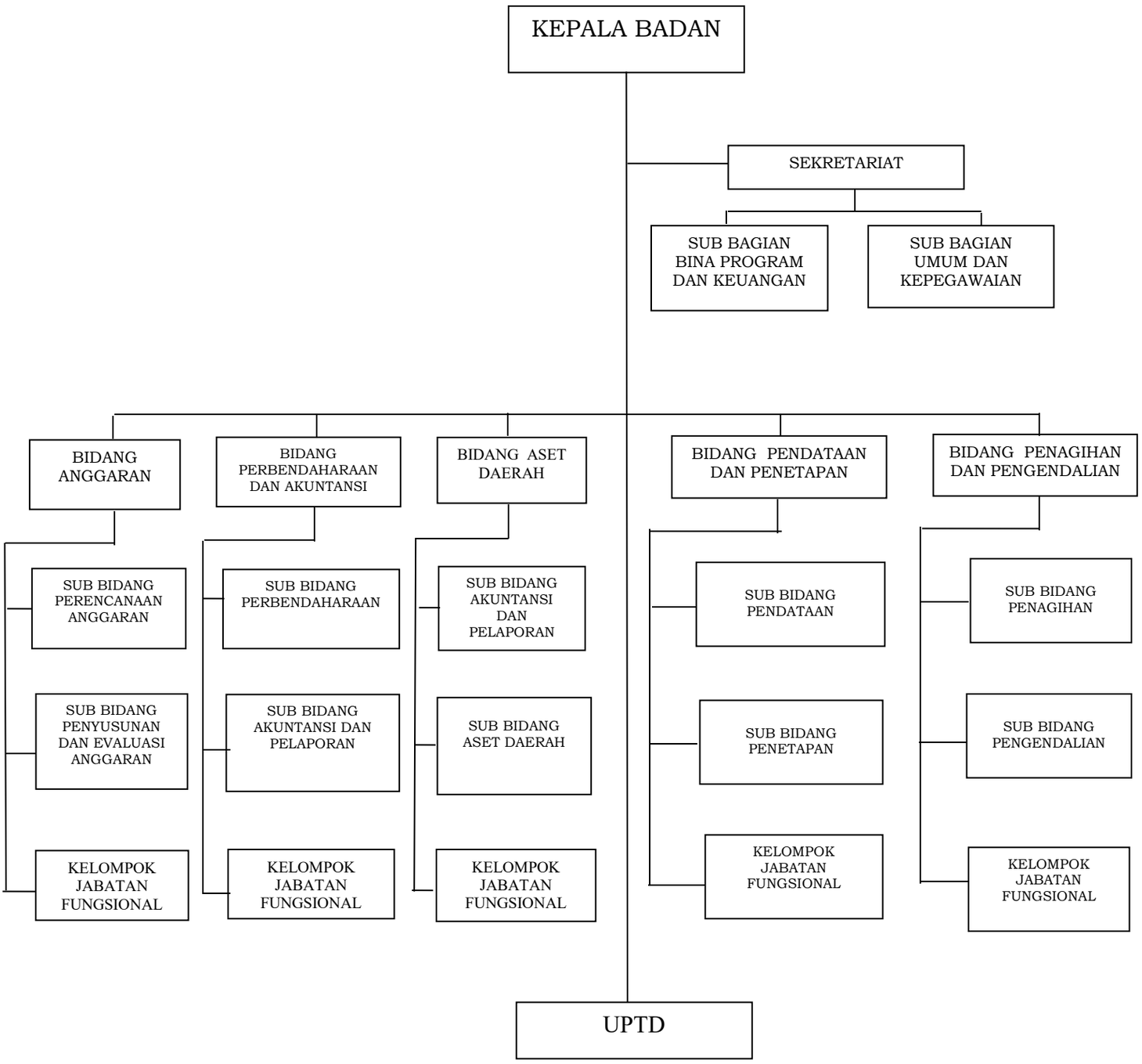

https://jdih.pemalangkab.go.id

1. Kepala BPKPAD

   Tugas Kepala BPKPAD adalah :

   membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

   Kepala BPKPAD melaksanakan fungsi:

   1. Perumusan kebijakan di bidang anggaran, perbendaharaan dan akuntansi, aset daerah, perencanaan, pendaftaran dan pendataan, serta penetapan, penagihan dan pelaporan pendapatan daerah;
   2. Pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran, perbendaharaan dan akuntansi, aset daerah, perencanaan, pendaftaran dan pendataan, serta penetapan, penagihan dan pelaporan pendapatan daerah;
   3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran, perbendaharaan dan akuntansi, aset daerah, perencanaan, pendaftaran dan pendataan, serta penetapan, penagihan dan pelaporan pendapatan daerah;
   4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
   5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

   Uraian Tugas Kepala BPKPAD sebagai berikut :

   1. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
   2. Merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) bidang pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah.
   3. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah.
   4. Mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
   5. Merumuskan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai pedoman penyusunan.
   6. Merumuskan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Pemalang sesuai kebijakan akuntansi.
   7. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;

https://jdih.pemalangkab.go.id

8. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yaitu:
   a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
   b. Mengesahkan DPA-SKPD;
   c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
   d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
   e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
   f. Menetapkan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD);
   g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
   h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
   i. Menyajikan informasi keuangan daerah;
   j. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD;
   k. Melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
   l. Membuka rekening kas umum daerah;
   m. Membuka rekening penerimaan daerah;
   n. Membuka rekening pengeluaran daerah;
   o. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
9. Menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan menindaklanjuti permohonan keberatan atas besaran ketetapan pajak oleh wajib pajak.
10. Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
11. Mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bidang pengelolaan keuangan pendapatan dan aset daerah sesuai dengan unsur SPIP.
12. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
13. Merumuskan inovasi daerah bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
14. Merumuskan laporan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sekretaris

   Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPKPAD. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

   1. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan BPKPAD;
   2. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan BPKPAD;

https://jdih.pemalangkab.go.id

3. Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan BPKPAD;
4. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan BPKPAD;
5. Penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
6. Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BPKPAD;
7. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan BPKPAD; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas sekretaris adalah :

1. Merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan;
2. Mengkoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
3. Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan;
4. Menyelenggarakan pemberian koordinasi, dukungan meliputi pelayanan ketatausahaan, pembinaan, administrasi kepegawaian, pengelolaan kedinasan hukum, dan yang keuangan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kerjasama, kehumasan, kearsipan, dokumentasi dan pengadaan barang/jasa.
5. Menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian;
6. Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik;
7. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan unsur SPIP;
8. Melaksanakan pengelolaan resiko operasional atas pelaksanaan kegiatan di sekretariat;
9. Menyusun konsep inovasi kesekretariatan;
10. Mengoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang-bidang;
11. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan;
12. Mengoordinasikan penyusunan laporan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris dibantu oleh :

1. Sub Bagian Bina Program dan Keuangan; dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

https://jdih.pemalangkab.go.id

3. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan anggaran serta penyusunan dan evaluasi anggaran. Dalam melaksanakan melaksanakan tugas tersebut, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:

1. Menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan anggaran serta penyusunan dan evaluasi anggaran; dan
2. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Anggaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Anggaran berdasarkan dokumen rencana kerja organisasi perangkat daerah.
2. Menyusun rancangan kebijakan Bidang Anggaran.
3. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan anggaran serta penyusunan dan evaluasi anggaran.
4. Menyelenggarakan program dan kegiatan Subbidang Perencanaan Anggaran serta Subbidang Penyusunan dan Evaluasi Anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
5. Memverifikasi konsep rancangan kebijakan umum anggaran, perubahan anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
6. Memverifikasi konsep rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perubahan APBD, serta rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan perubahan APBD sesuai dengan pedoman perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.
7. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan perubahan APBD serta Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan perubahan APBD kepada Perangkat Daerah.
8. Memverifikasi proses persetujuan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
9. Menyelenggarakan pengelolaan analisa data dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah;
10. Melaksanakan pengelolaan resiko operasional atas kegiatan yang dilaksanakan bidang anggaran;
11. Menyusun konsep inovasi pada Bidang Anggaran.
12. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Anggaran.
13. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Anggaran.
14. Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Anggaran.
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh 2 sub bidang yaitu :

1. Sub bidang perencanaan anggaran;
2. Sub bidang penyusunan dan evaluasi anggaran.

4. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di subbidang pengelolaan perbendaharaan daerah dan subbidang pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi melaksanakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di subbidang pengelolaan perbendaharaan daerah dan subbidang pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; dan
2. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi adalah :

1. Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi berdasarkan dokumen rencana kerja perangkat daerah;
2. Menyusun rancangan kebijakan Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi;
3. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan perbendaharaan daerah dan bidang pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
4. Menyelenggarakan program dan kegiatan Subbidang Perbendaharaan dan Subbidang Akuntansi dan Pelaporan;
5. Melaksanakan fungsi kuasa Bendahara Umum Daerah yang bertugas sebagai berikut:
    a. Menyiapkan anggaran kas dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD);
    b. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
    c. Menerbitkan SP2D;
    d. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
    e. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
    f. Menyimpan uang daerah;
    g. Melaksanakan penempatan uang daerah dan menatausahakan investasi;
    h. Melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas beban APBD;
    i. Melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
    j. Menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD;

https://jdih.pemalangkab.go.id

6. Memverifikasi konsep rancangan Peraturan Bupati tentang sistim dan prosedur pengelolaan keuangan daerah serta rancangan peraturan bupati lainnya terkait penatausahaan keuangan daerah;
7. Memverifikasi konsep rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
8. Menerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji ASN;
9. Melaksanakan pengelolaan resiko operasional atas kegiatan yang dilaksanakan bidang perbendaharaan dan akuntansi;
10. Menyusun konsep inovasi pada Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi.
11. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi;
12. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi;
13. Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi;
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi dibantu oleh 2 sub bidang yaitu :

1. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
2. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan

5. Bidang Aset Daerah

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan subbidang pengelolaan aset daerah.

Fungsi yang dilaksanakan oleh Bidang Aset Daerah adalah :

1. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan dan penatausahaan serta pengawasan dan pengendalian aset daerah; dan
2. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Bidang Aset Daerah sebagai berikut :

1. Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang pengelolaan Aset Daerah;
2. Menyusun rancangan kebijakan Bidang Aset Daerah;
3. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, penetapan status, inventarisasi, pelaporan, penghapusan serta pengawasan dan pengendalian aset daerah;
4. Menyelenggarakan program dan kegiatan Subbidang Perencanaan, Penatausahaan dan Pelaporan serta Subbidang Optimalisasi dan Pengamanan;
5. Menyelenggarakan pengelolaan analisa data dan pengembangan sistem barang milik daerah yang meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem informasi pengelolaan barang milik daerah, , fasilitasi dan bimbingan teknis pengelolaan barang milik daerah kepada Perangkat Daerah secara efektif, serta

https://jdih.pemalangkab.go.id

menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap barang milik daerah;
6. Melaksanakan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah, penyusunan rancangan peraturan bupati tentang pengelolaan barang milik daerah;
7. Menyusun konsep penyelenggaraan kegiatan penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik Daerah;
8. Melaksanakan pengelolaan resiko atas kegiatan yang dilakukan bidang aset daerah;
9. Menyusun konsep inovasi pada Bidang Aset Daerah;
10. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Aset Daerah;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Aset Daerah;
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Aset Daerah;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Aset Daerah dibantu oleh 2 sub bidang yaitu :

1. Sub bidang Perencanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah;
2. Sub bidang Optimalisasi dan Pengamanan Aset Daerah

6. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB serta pajak daerah lainnya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di pendataan dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB serta pajak daerah lainnya; dan
2. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Bidang Pendataan dan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan bidang pendataan dan penetapan berdasarkan dokumen rencana kerja organisasi perangkat daerah;
2. Menyusun rancangan kebijakan bidang pendataan dan penetapan;
3. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendataan dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB serta pajak daerah lainnya;
4. Menyelenggarakan program dan kegiatan Subbidang Pendataan serta Subbidang Penetapan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

https://jdih.pemalangkab.go.id

5. Menyelenggarakan perencanaan, pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah sesuai prosedur pengelolaan pajak daerah guna menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Nomor Objek Pajak;
6. Mengembangkan kegiatan dalam rangka koordinasi program kerja dan kegiatan pelayanan pajak daerah;
7. Mengembangkan penerapan konsep pelayanan prima pelaksanaan pelayanan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek/ wajib pajak daerah;
8. Mengembangkan pelaksanaan pelayanan self assessment pajak daerah;
9. Mengembangkan pelaksanaan official assessment pajak daerah;
10. Mengkoordinasikan penetapan piutang pajak daerah;
11. Mengelola resiko operasional atas kegiatan yang dilaksanakan bidang pendataan dan penetapan;
12. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi atas pendapatan asli daerah termasuk pendapatan pajak dan retribusi daerah;
13. Menyusun kebijakan dan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah;
14. Mengkoordinasikan penetapan target dan realisasi PAD;
15. Mengkoordinasikan penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa;
16. Menyusun konsep inovasi pada bidang pendataan dan penetapan;
17. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada bidang pendataan dan penetapan;
18. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada bidang pendataan dan penetapan;
19. Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada bidang pendataan dan penetapan;
20. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan dibantu oleh 2 sub bidang yaitu :

1. Sub bidang Pendataan
2. Sub bidang Penetapan

7. Bidang Penagihan dan Pengendalian

Bidang Penagihan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penagihan dan Pengendalian pajak daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penagihan dan pengendalian terkait PBB-P2 dan BPHTB serta pajak daerah lainnya; dan
2. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun fungsi Bidang Penagihan dan Pengendalian adalah :

1. Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Penagihan dan Pengendalian berdasarkan dokumen rencana kerja organisasi perangkat daerah;
2. Menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Penagihan dan Pengendalian;
3. Menyelenggarakan program dan kegiatan Subbidang Penagihan dan Subbidang Pengendalian sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
4. Menyusun rancangan regulasi pengelolaan pajak daerah;
5. Menyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah;
6. Menyelenggarakan pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah;
7. Menyelenggarakan pelayanan penagihan, konsultasi dan penyelesaian keberatan pajak daerah;
8. Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
9. Melaksanakan fungsi kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu :
   a. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
   b. Melakukan Penagihan Piutang Daerah.
10. Menyusun konsep inovasi pada Bidang Penagihan dan Pengendalian;
11. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Penagihan dan Pengendalian;
12. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Penagihan dan Pengendalian;
13. Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Penagihan dan Pengendalian;
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian dibantu oleh 2 sub bidang yaitu :

1. Sub bidang Penagihan
2. Sub bidang Pengendalian

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.1.2. Sumber Daya BPKPAD

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia di BPKPAD

Sumber Daya Manusia pada Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang terdiri dari sumber daya manusia dari BAPENDA 50 ORANG, L : 39 orang P : 11 orang, dengan rincian Golongan IV 6 orang L = 3 P = 3 , Golongan III 28 orang L : 22 P ; 6 orang, Golongan II 16 orang L: 14 dan P: 2 orang dan tenaga kontrak 24 orang, jadi jika BPKAD berjumlah 35 orang maka calon pegawai BPKPAD berjumlah 90 personil ASN dengan rincian 57 orang laki-laki dan 33 orang Perempuan. Data personil BPKPAD sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel : 2.1
Jumlah Pegawai BPKPAD Kabupaten Pemalang
Berdasarkan Tingkat Golongan

NO	URAIAN	L	P	JUMLAH
1	Golongan IV	6	6	12
2	Golongan III	10	16	26
3	Golongan II	2	-	2
4	Golongan I	-	-	-
JUMLAH		18	22	40

Sumber : DUK BPKPAD Kabupaten Pemalang

Tabel : 2.2
Distribusi Pegawai BPKPAD Kabupaten Pemalang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	SMP		SMA		D3		S1		S2		S3		Jml
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	SMP	1												1
2.	SMA			2	2									4
3.	D3					1	1							2
4.	D4/S1							7	11					18
5.	S2									4	6			10
6.	S3											-	-	
	Jumlah	1		2	2	1	1	7	11	4	6	-	-	35

Sumber : DUK BPKPAD Kabupaten Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel : 2.3
Distribusi Pegawai BPKPAD Kabupaten Pemalang
Berdasarkan Jabatan dan Kelas Jabatan

No	Uraian	L	P	JUMLAH
1.	Pejabat Struktural			13
2.	Pejabat Fungsional			1
3.	Pelaksana kelas jabatan 7			10
4.	Pelaksana kelas Jabatan 6			10
5.	Pelaksana kelas Jabatan 5			-
6.	Pelaksana kelas Jabatan 3			1
	Jumlah			35

Sumber : DUK BPKPAD Kabupaten Pemalang

2.1.2.2. Sarana dan Prasarana BPKPAD

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang memiliki sarana dan prasarana yang merupakan faktor pendukung dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sarana dan prasarana (Inventaris) yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dapat dirinci sebagaimana pada Tabel berikut :

Tabel : 2.4
Sarana dan Prasarana (Inventaris)
BPKPAD Kabupaten Pemalang

NO	NAMA BARANG	BAPENDA		JUMLAH	BPKAD	
		B	R		BAIK	RUSAK
1	**ALAT BESAR**					
	Truck Crane			1 Unit	1	
	(Pinjam Pakai ke Kodim)					
	Portable Generating Set	1		1 Unit	1	
	Alat Survey Pelayanan BPKPAD			1 Unit	1	
2	**KOMPUTER**					
	Mini Komputer			5 Unit	5	
	Local Area Network (LAN)			1 Unit	1	
	Komputer Jaringan lainnya	3		2 Unit	2	
	Personal Komputer Lain			1 Unit	1	
	P.C Unit	54		68 Unit	57	11
	Laptop			50 Unit	38	12
	Note Book	31		29 Unit	19	10
	Tablet PC			1 Unit	1	
	CPU (Peralatan Mainframe)			2 Unit		2
	Hard Disk	3		3 Unit	3	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	NAMA BARANG	BAPENDA		JUMLAH	BPKAD	
		B	R		BAIK	RUSAK
	peralatan mainframe lainnya (dst)			3 Unit	3	
	Monitor			10 Unit	9	1
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	107		101 Unit	89	12
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4		10 Unit	8	2
	Server	7		9 Unit	9	
	Router	1		2 Unit	2	
	Rak Server			1 Unit	1	
	Peralatan Jaringan lainnya			2 Unit	2	
3	**ALAT ANGKUTAN**					
	Kendaraan Roda-4	8		39 Unit	39	
	Kendaraan Roda-2	52	1	516 Unit	516	
	Gerobak Dorong			2 Unit	2	
4	**ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR**					
	alat ukur lain-lain lainnya (dst)			2 Unit	2	
5	**ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA**					
	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	4		2 Unit	1	2
	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	15		1 Unit		1
	Mesin Fotocopy Folio			2 Unit	2	
	Mesin Hitung Uang	12		1 Unit	1	
	Lemari Besi/Metal			5 Unit	5	
	Lemari Kayu	8		17 Unit	17	
	Rak Besi	13		12 Unit	12	
	Rak Kayu			3 Unit	3	
	Filing Cabinet Besi	10		55 Unit	55	
	Brandkas	1		7 Unit	7	
	Lemari Kaca	1		4 Unit	4	
	Papan Visual/Papan Nama			1 Unit	1	
	White Board	3		8 Unit	2	6
	Mesin Perforator Besar	1		2 Unit	2	
	Alat Penghancur Kertas	4		11 Unit	8	3
	Mesin Absensi	1		2 Unit	2	
	Overhead Projector			4 Unit	4	
	Papan Nama Instansi			2 Unit	2	
	Papan Pengumuman			2 Unit	2	
	Alat Kantor Lainnya			6 Unit	6	
	Kursi Besi/Metal	13		7 Unit	7	
	Meja Rapat			13 Unit	13	
	Meja Resepsionis	1		1 Unit	1	
	Meja Biro Eselom II			1 Unit	1	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	NAMA BARANG	BAPENDA		JUMLAH	BPKAD	
		B	R		BAIK	RUSAK
	Meja Biro Eselom III	6		1 Unit	1	
	Meja Biro Kecil			1 Unit	1	
	Meja 1/2 Biro	1		3 Unit	3	
	Kursi Rapat	48		78 Unit	78	
	Kursi Lipat	90		6 Unit	6	
	Kursi Tamu	1		1 Unit	1	
	Kursi Putar	10		11 Unit	11	
	Kursi Kayu	15		4 Unit	4	
	Meja Komputer			17 Unit	17	
	Meubeleur lainnya			6 Unit	6	
	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1		1 Unit	1	
	Kalkulator			1 Unit	1	
	Lemari Es			5 Unit	5	
	A.C. Window			16 Unit	15	1
	A.C. Split	28		29 Unit	27	2
	Kipas Angin	5		3 Unit	3	
	Exhause Fan			1 Unit	1	
	Alat Dapur lainnya			1 Unit	1	
	Televisi	3	1	14 Unit	13	1
	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			1 Unit	1	
	Loudspeaker			1 Unit	1	
	Sound System	1		2 Unit	2	
	Wireless			1 Unit	1	
	Microphone			1 Unit	1	
	Camera Video			1 Unit	1	
	Tangga Aluminium			1 Unit	1	
	Dispenser	3		9 Unit	6	3
	Mimbar/Podium			3 Unit	3	
	Bracket Standing Peralatan	1		1 Unit	1	
	Alat Rumah Tangga Lain-lain			2 Unit	2	
	Alat Pemadam/Portable	2		8 Unit	8	
	Meja Kerja Pejabat Eselon III			1 Unit	1	
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	40		3 Unit	3	
	Meja Kerja Pejabat lain-lain	3		2 Unit	2	
	Meja Tamu Biasa	2		7 Unit	7	
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6		8 Unit	8	
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	14		9 Unit	9	
	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural			8 Unit	8	
	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Wali kota			1 Unit	1	
	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis			4 Unit	4	
6	**ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN**					

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	NAMA BARANG	BAPENDA		JUMLAH	BPKAD	
		B	R		BAIK	RUSAK
	PEMANCAR					
	Audio Amplifier			1 Unit	1	
	Compact Disc Player			1 Unit	1	
	Intercom Unit	1		8 Unit	2	6
	Microphone/Wireless MIC	1		1 Unit	1	
	Uninterruptible Power Supply (UPS)	4		12 Unit	11	1
	Uninterruptible Power nonSupply			1 Unit	1	
	peralatan studio audio lainnya (dst)			15 Unit	15	
	Camera Electronic	2		2 Unit	2	
	Alat Studio Pemetaan lainnya	1		2 Unit	2	
	Alat Studio Lainnya			1 Unit	1	
	Telephone (PABX)			5 Unit	5	
	Telephone Mobile	1		3 Unit	1	2
	Facsimile	1		2 Unit	1	1
	Unit Tranceiver Ssb Portable			1 Unit	1	
	Alat Detektor Uang Palsu	1		1 Unit	1	
	LAYAR FILM	2				
	Lemari buku eselon II	1				
	cctv	1				

2.1.3. Kinerja Pelayanan BPKPAD

Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan aset daerah. Kegiatan pelayanan pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pedoman penyusunan anggaran, penyusunan sistim dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, pedoman pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah, pedoman pelaksanaan pengelolaan aset daerah dan pedoman pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Aktivitas pelayanan keuangan berupa pendampingan penganggaran perangkat daerah yang terdiri dari penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan, pencairan dana yang dikelola perangkat daerah, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Aktivitas Pengelolaan Pendapatan Daerah berupa penggalian potensi pendapatan asli daerah, pelayanan

https://jdih.pemalangkab.go.id

pengaduan/keberatan atas pengelolaan pendapatan, pelayanan digitalisasi penerimaan pendapatan asli daerah, pelayanan penagihan dan penyelesaian piutang daerah. Aktivitas Pengelolaan aset daerah berupa penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, pelayanan penerimaan pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah, pelayanan penatausahaan dan inventarisasi barang milik daerah, pelayanan pengamanan aset daerah, pelayanan penghapusan barang milik daerah serta pembinaan pengurus barang perangkat daerah.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tujuan dan sasaran BPKPAD tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia yang memadai dan kompeten serta sarana prasarana pendukung kinerja yang baik. Pencapaian target kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang diukur berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang. Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029 merupakan gabungan IKU BPKAD dengan IKU BAPENDA. IKU BPKPAD ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timebound*).

Specific (Spesifik)

- IKU harus spesifik dan jelas dengan definisi yang tepat tentang apa yang ingin dicapai.

Measurable (Terukur)

- IKU harus dapat diukur sehingga dapat diukur progress capaiannya serta dapat di evaluasi

Achievable (Bisa dicapai)

- IKU harus realistis dan dapat dicapai dengan waktu dan sumberdaya yang dimilikki

Relevant (Jelas hubungannya)

- IKU memiliki hubungan yang erat dengan tujuan dan sasaran BPKPAD

Time Bound (Ada Tenggat Waktu)

- Ketercapaian IKU mempunyai batas waktu untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan.

Capaian Kinerja layanan tahun 2020-2024 merupakan gabungan kinerja layanan BPKAD dengan kinerja layanan BAPENDA dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN					PERTUMBUHAN KINERJA				RATA-RATA
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1	Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	61,9133	65,0394	62,5009	65,7108	70,1277	5,05%	-3,90%	5,16%	6,72%	0,91%
2	Persentase Pemanfaatan BMD	%	90,00	94,34	97,83	99,13	99,13	4,82%	3,70%	1,33%	0%	1,97%
3	Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran	Nilai	14,0351	12,162	3	12,6237	6,5277	-13,35%	-75,33%	320,79%	-48,29%	41,24%
4	Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran	Nilai	10	20	15	15	15	100%	-25%	0%	0%	8,4%
5	Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah	Nilai	1,1490	1,1433	2,5182	2,2200	4,0260	-0,49%	120,26%	-11,84%	81,35%	59,84%
6	Persentase Barang Milik Daerah yang	%	35,30	34,67	32,98	36,96	45,53	-1,78%	-4,87%	12,07%	0,63%	1,51%

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN					PERTUMBUHAN KINERJA				RATA-RATA
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	dimilikki											
7	Persentase PAD terhadap total pendapatan	%	12,72	13,88	14	14,14	14,16	0,091	0,009	0,01	0,001	0,028
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	82,57	80,84	81,19	82,38	84,02	NA	-2,10%	0,43%	1,99%	0,11%
9	Nilai SAKIP	Nilai	56,15	61,09	62,13	63,15	64,36	8,80%	1,70%	1,64%	1,92%	3,52%
10	Persentase wajib pajak tertagih/data pajak daerah yang ditetapkan (PBB)	%	68,33	80,69	75,77	76,28	71,68	0,181	-0,061	0,007	-0,06	0,017
11	Persentase kebijakan pendapatan yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0
12	Persentase pajak daerah terhadap PAD	%	25,87	24,28	29,21	31,96	31,47	-0,061	0,203	0,094	-0,015	0,055

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan capaian masing-masing target indikator kinerja masih relatif kecil dengan rata-rata pertumbuhan juga kecil. Hal ini menggambarkan bahwa fluktuasi realisasi masing-masing indikator kinerja dari tahun ke tahun relatif stabil.

Adapun kendala dalam pencapaian target IKU adalah :

1. Penetapan target indikator baru yang tidak ada pada periode renstra sebelumnya, belum menggunakan database realisasi 5 (lima) tahun sebelumnya. Akibatnya penetapan target terlalu tinggi karena tidak tersedianya data capaian IKU pada renstra periode sebelumnya.
2. Amanat pengukuran IPKD berdasarkan Permendagri 19 tahun 2020 belum disertai dengan penyediaan sistem aplikasi untuk menghitung IPKD tersebut. Sistem aplikasi pengukuran IPKD *dilaunching* sekitar bulan juli 2021. Sehingga database pengukuran IPKD tahun 2018, 2019 dan 2020 dilakukan bersamaan pada tahun 2021.
3. Indikator Hasil Pengukuran Indeks penyerapan anggaran, Hasil pengukuran indeks kesesuaian dokumen penganggaran dan Hasil pengukuran indeks kondisi keuangan daerah merupakan komponen dari IPKD. Sehingga kendala realisasinya pun sama dengan IPKD.
4. Indikator kinerja persentase pemanfaatan barang milik daerah merupakan bagian dari optimalisasi pengelolaan BMD. Tetapi data pemanfaatan BMD di Kabupaten Pemalang belum terkonsolidasi. Sehingga Indikator kinerja persentase pemanfaatan BMD belum mencerminkan pemanfaatan BMD secara keseluruhan di Kabupaten Pemalang. Dalam hal ini, implementasi peran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam pemanfaatan BMD belum optimal. Sehingga data pemanfaatan BMD hanya bisa disajikan secara parsial di masing-masing perangkat daerah, tidak menyeluruh pemanfaatab BMD se-kabupaten Pemalang.
5. Indikator Persentase PAD terhadap Total Pendapatan belum optimal dikarenakan belum tergalinya secara optimal potensi PAD di Kabupaten Pemalang. Selain itu, masih adanya kebocoran penerimaan PAD yang disebabkan pengelolaan PAD masih dilakukan secara manual atau belum berbasis digital/sistem aplikasi.
6. Indikator Persentase Wajib Pajak Tertagih (PBB) belum optimal karena implementasi sistem penagihan masih dilakukan secara manual, masyarakat belum terbiasa membayar PBB menggunakan aplikasi e_PBB online serta rendahnya kesadaran Masyarakat untuk membayar PBB. Selain hal tersebut, data objek PBB yang belum mutakhir menjadi penyebab tingginya piutang pajak daerah yang tidak tertagih.
7. Capaian Indikator Persentase Pajak Daerah terhadap PAD masih tergantung pada jenis pajak tertentu. Capaian masing-masing jenis pajak relative berbeda-beda bahkan kesenjangan perbedaan tersebut sangat tinggi. Hal ini merupakan tantangan bagi BPKPAD untuk lebih mengintensifkan penerimaan pajak daerah dengan pola diversifikasi pajak daerah agar semua potensi pajak daerah menjadi tonggak PAD dan masing-masing jenis pajak daerah memberi kontribusi yang signifikan terhadap realisasi PAD.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel : 2.6

Evaluasi Indikator Kinerja Pelayanan Periode 2021-2026

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Renstra	Sat	Target Renstra BPKPAD pada Tahun ke						Realisasi capaian kinerja pada tahun ke				Persentase capaian pada tahun ke (%)			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	80	80	80	80	80	80	65,0394	62,5009	65,7108	70,1277	81,30	78,13	82,14	87,66
2	Persentase Pemanfaatan BMD	%	93	93	93	93	93	93	94,34	97,83	99,13	99,13	101,44	105,19	106,59	99,98
3	Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran	Indeks	15	15	15	15	15	15	12,162	3	12,6237	6,5277	81,08	20	84,16	43,52
4	Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran	Indeks	20	20	20	20	20	20	20	15	15	15	100	75	75	75
5	Hasil Pengukuan Indeks Kondisi Keuangan Daerah	Indeks	15	15	15	15	15	15	1,1433	2,5182	2,2200	4,0260	7,62	16,79	14,8	26,84
6	Persentase BMD yang dimilikki	%	50	55	60	65	75	80	34,67	32,38	36,96	45,53	69,34	58,87	61,60	70,05
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	84,08	84,08	84,09	84,09	84,10	84,10	79,79	81,67	82,67	86,63	94,89	97,13	98,31	103,02
8	Persentase Penyampaian Raperda APBD sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	50	100	50	100	50	100	50	100
9	Persentase Belanja urusan Pemerintahan Umum	%	60	60	60	60	60	60	69,81	73,64	70,14	72,02	116,35	122,73	116,9	120,03
10	Persentase penerbitan SP2D sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Renstra	Sat	Target Renstra BPKPAD pada Tahun ke						Realisasi capaian kinerja pada tahun ke				Persentase capaian pada tahun ke (%)			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	sesuai ketentuan															
12	Persentase Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Persentase Tertib Administrasi Penatausahaan BMD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Indeks Reformasi RB	Indeks	53,10	53,20	53,30	53,40	53,50	53,60	55,07	53,19	-	-	103,58	99,98	-	-
15	Nilai SAKIP	Nilai	60.30	60,40	60,50	60,60	60,70	60,80	61,92	62,15	63,25	64,15	102,69	102,89	104,55	105,86
16	Persentase PAD terhadap total pendapatan	%	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,88	14	14,14	14,16	103%	104%	105%	105%
17	Persentase wajib pajak tertagih/data pajak daerah yang ditetapkan (PBB)	%	75	75	75	75	75	75	80,69	75,77	76,28	71,68	108%	101%	102%	96%
18	Persentase kebijakan pendapatan yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%
19	Persentase pajak daerah terhadap PAD	%	25	25	25	25	25	25	24,28	29,21	31,96	31,47	97%	117%	128%	126%

https://jdih.pemalangkab.go.id

Berdasarkan tabel 2.6 di atas, dapat disimpulkan bahwa ketercapaian indikator kinerja sampai dengan 2024 belum optimal, masih terdapat indikator yang belum tercapai walaupun terdapat beberapa indikator yang capaiannya melebihi target yang ditetapkan. Indikator kinerja yang capaiannya melebihi target yang ditetapkan adalah :

1. Indeks Kepauasan Masyarakat (IKM);
2. Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum;
3. Nilai SAKIP;
4. Persentase PAD terhadap total Pendapatan; dan
5. Persentase Pajak Daerah terhadap PAD.

Terhadap indikator yang capaiannya melebihi target yang ditetapkan maka dilakukan evaluasi. Apabila indikator tersebut masih digunakan pada periode renstra 2025-2029 karena merupakan amanat regulasi maka perlu peningkatan target yang ditetapkan agar capaian lebih optimal lagi.

Kemudian terdapat indikator kinerja yang tercapai tepat 100% yaitu :

1. Persentase Penyampaian Raperda APBD sesuai ketentuan;
2. Persentase Penerbitan SP2D sesuai ketentuan;
3. Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah sesuai ketentuan;
4. Persentase Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai ketentuan;
5. Persentase Tertib Administrasi Penatausahaan BMD; dan
6. Persentase kebijakan pendapatan yang diselesaikan.

Terhadap indikator yang telah tercapai 100% maka dilakukan evaluasi. Apabila indikator tersebut merupakan amanat regulasi maka digunakan kembali pada periode renstra 2025-2029 dengan penyesuaian target berdasarkan capaian pada periode renstra sebelumnya.

Selanjutnya terdapat indikator yang belum tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu :

1. Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD);
2. Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD);
3. Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran;
4. Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran;
5. Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah;
6. Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang dimilikki; dan
7. Persentase Wajib Pajak Tertagih/Data Pajak Daerah yang ditetapkan (PBB).

Terhadap indikator yang belum tercapai sesuai target dan indikator tersebut digunakan lagi pada periode renstra 2025-2029 maka dilakukan evaluasi atas penetapan target agar kesenjangan antara capaian dan target tidak terlalu jauh. Selain itu dilakukan identifikasi permasalahan dan kendala yang menjadi penyebab ketidaktercapaian indikator tersebut. Hasil identifikasi masalah dan kendala ditindaklanjuti dengan Solusi yang dapat mendorong peningkatan capaian indikator tersebut.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Penetapan indikator kinerja pada periode renstra tahun 2025-2029, selain berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pada renstra 2021-2026 juga mempertimbangkan kesesuaian kinerja yang akan dilakukan BPKPAD selama kurun waktu 5 tahun ke depan tanpa meninggalkan prinsip spesifik, terukur, ketercapaian, riil, dan ada batasan waktu capaian.

Pencapaian target kinerja pada periode renstra tahun 2021 – 2026 tidak lepas dari faktor pendanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 2021-2026. Adapun pendanaan program kegiatan tahun 2021 – 2026 beserta realisasinya secara rinci tercantum pada tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel : 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Tahun 2021 – 2026

No	Program	Rencana Anggaran pada Tahun ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp.000)				Persentase Realisasi Anggaran (%)			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	9.161.582	9.335.780	8.375.907	9.167.975	15.260.525	10.743.335	9.012.622	8.250.460	7.374.104	8.526.611	98,4%	88,4%	88,0%	93,0%
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	513.121.607	479.187.238	435.064.765	444.289.144	464.120.759	462.807.443	508.751.865	474.957.196	433.529.743	443.368.245	99,1%	99,1%	99,6%	99,8%
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	884.920	5.949.100	1.760.830	887.000	404.599	505.000	662.749	5.409.834	1.729.170	838.383	74,9%	90,9%	98,2%	94,5%
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	958.701	2.205.000	2.550.279	2.319.831	2.137.866	2.504.724	939.376	2.144.029	2.506.094	2.218.142	97,98%	97,23%	98,27%	95,62%
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	10.785.670	14.076.213	14.312.527	12.475.880	13.116.423	13.183.442	10.557.431	13.185.605	12.601.102	11.774.872	97,88%	93,67%	88,04%	94,38%
	Jumlah	534.912.480	510.753.331	462.064.308	469.139.830	495.040.172	489.743.944	529.924.043	503.947.124	457.740.213	466.726.253	99,07%	98,67%	99,06%	99,49%

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.1.4. Kelompok Sasaran

Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten pemalang merupakan perangkat daerah yang melaksanakan 2 fungsi yaitu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), BPKPAD mengelola anggaran PPKD selain anggaran operasional BPKPAD. Belanja PPKD yang dikelola oleh BPKPAD adalah Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Selain belanja PPKD, BPKPAD mengelola Penerimaan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Dana Perimbangan (Dana Transfer) serta Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Sehingga kelompok sasaran pelayanan BPKPAD pun berbeda dengan perangkat daerah lain. Kelompok sasaran pelayanan BPKPAD adalah :

1. Perangkat Daerah;
2. Desa dan Perangkat Desa;
3. BUMD;
4. Masyarakat penerima bantuan sosial dan korban bencana;
5. Masyarakat (penyewa aset daerah);
6. Wajib Pajak Daerah (pemilik tanah & bangunan/PBB, pemilik restoran/hotel/hiburan/lahan parkir)
7. Wajib Pajak Daerah (pemilik kendaraan terkait PKB/BBNKB);
8. UMKM; dan
9. Wajib Pajak Potensial/Non-Formal (Individu atau badan yang berpotensi menjadi wajib pajak namun belum tercatat dalam basis data).

2.1.5. Mitra BPKPAD Kabupaten Pemalang

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang bermitra dengan pihak-pihak yang dapat berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan dan peningkatan kinerja. Mitra tersebut adalah :

1. BUMD (PT Bank Jateng Cabang Pemalang);
2. Kejaksaan Negeri;
3. Badan Pertanahan Nasional;
4. UPTD Samsat;
5. KPPN Tegal;
6. DPRD Kabupaten Pemalang;
7. Bapenda Provinsi Jawa Tengah;
8. BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
9. Perangkat Daerah;
10. Kementrian Keuangan;
11. Kementrian Dalam Negeri;
12. KPP Pratama Pekalongan;

https://jdih.pemalangkab.go.id

13. KPKNL Tegal;
14. Kantor BPJS Kesehatan Pemalang;
15. Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pemalang;
16. PT Taspen.
17. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

2.1.6. Dukungan BUMD

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak khususnya dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). PT Bank Jateng Cabang Pemalang sebagai bank yang ditunjuk untuk penempatan dan penyimpanan uang daerah telah mendukung upaya peningkatan pelaksanaan transaksi non tunai atas belanja APBD. Transaksi non tunai yang dimaksud adalah pembayaran gaji ASN dan pembayaran kepada Pihak Ketiga serta transaksi yang dilaksanakan dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Selain itu PT Bank Jateng Cabang Pemalang telah mendukung implementasi *e*-retribusi termasuk *e*-retribusi di pasar-pasar daerah. Pembayaran PBB secara online pun merupakan hasil dukungan PT Bank Jateng Cabang Pemalang dalam menjamin kemudahan pembayaran PBB melalui aplikasi bima mobile, laku pandai dan *e*-PBB *online.* Ke depan supporting dari BUMD sangat dibutuhkan oleh BPKPAD dalam mempercepat terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang didukung dengan peningkatan PAD dan peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah.

2.1.7. Kerjasama Daerah

Kerjasama daerah dilakukan dalam rangka melegalkan suatu perjanjian yang saling menguntungkan serta menuangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan. Kerjasama yang dibutuhkan oleh BPKPAD Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah :

1. PT Bank Jateng Cabang Pemalang
   Beberapa materi Kerjasama yang perlu dilaksanakan dengan PT Bank Jateng Cabang Pemalang adalah Kerjasama terkait :
   1.1 Pengelolaan kas daerah;
   1.2 Pelaksanaan transaksi non tunai melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
   1.3 Implementasi *e*-retribusi;
   1.4 Pembayaran pajak *online,*
2. Kementrian ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional)
   Kerjasama yang terbangun dengan Kementrian ATR/BPN adalah terkait :
   2.1 Pengintegrasian data pertanahan dengan data PBB P2, BPHTB dan Zona Nilai Tanah (ZNT);

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.2 Inventarisasi Tanah Instansi Pemda dan Pensertifikatan Tanah Aset Pemda di Kabupaten Pemalang;

3. PT Taspen Persero

Kerjasama dengan PT Taspen Persero terkait pengelolaan data gaji ASN aktif melalui penggunaan bersama SIM GAJI.

3.2. Permasalahan dan Isu Strategis BPKPAD Kabupaten Pemalang

3.2.1. Permasalahan

Permasalahan pada BPKPAD Kabupaten Pemalang merupakan gap atau perbedaan antara kinerja pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah dengan kondisi ideal yang bisa dicapai. Identifikasi permasalahan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sangat bermanfaat dalam merumuskan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak diinginkan di masa depan. Sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah semakin efektif.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.9
Perumusan Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah
Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang

Urusan	Sub Urusan	Kewenangan	Indikator	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4	5	6	7
Pemerintahan Umum	Penunjang	Keuangan	Sistim Informasi Pengelolaan barang milik daerah yang terpadu dengan sistim informasi pengelolaan keuangan daerah	Belum optimalnya tata kelola keuangan daerah	Belum terintegrasinya sistim informasi pengelolaan keuangan daerah dengan sistim informasi pengelolaan barang milik daerah	Pengelolaan data keuangan dan pengelolaan data aset daerah belum optimal karena masih menggunakan sistim informasi yang terpisah.
			Mandatory spending terlaksana sepenuhnya sesuai ketentuan	Belum optimalnya tata kelola keuangan daerah	Belum terpenuhinya mandatory spending sesuai ketentuan	Kebijakan alokasi anggaran pada APBD belum sepenuhnya memperhatikan amanat regulasi atau ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat
			Semua tanah milik Pemda telah bersertifikat	Belum optimalnya tata kelola aset daerah	Belum optimalnya Pengamanan Aset Daerah.	Belum adanya komitmen yang kuat dan fokus dari pemerintah daerah dalam menangani pengamanan aset daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id

Urusan	Sub Urusan	Kewenangan	Indikator	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4	5	6	7
			Pemanfaatan aset daerah dapat mendukung peningkatan PAD secara signifikan	Belum optimalnya tata kelola aset daerah	Belum optimalnya pemanfaatan Aset Daerah.	Belum terbangunnya sistim informasi pemanfaatan aset daerah.
			- Aset dengan status rusak sangat kecil atau tidak ada - Inventarisasi aset daerah akuntabel	Belum optimalnya tata kelola aset daerah	Pelaksanaan Inventarisasi, penghapusan dan penetapan status aset daerah belum optimal.	Belum optimalnya peran SKPKD dalam pengelolaan aset daerah
			Pajak Daerah berkontribusi besar dalam mendukung pelaksanaan APBD	Masih rendahnya PAD pajak daerah yang diterima namun angka belanja daerah tinggi	Pengelolaan pajak daerah belum optimal	Implementasi digitalisasi pengelolaan pajak daerah belum komprehensif
			Retribusi daerah menjadi komponen potensi PAD terbesar setelah pajak daerah.	Masih terdapat kebocoran penerimaan retribusi daerah.	Implementasi *e*-retribusi belum diterapkan terhadap semua jenis retribusi daerah	Digitalisasi retribusi daerah belum optimal
			Menurunnya piutang pajak daerah	Publikasi digitalisasi pembayaran	1. Potensi piutang pajak daerah yang terjadi	Belum optimalnya pengelolaan pajak daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id

Urusan	Sub Urusan	Kewenangan	Indikator	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4	5	6	7
				pajak daerah kepada Masyarakat belum maksimal	setiap tahun meningkat 2. Kesadaran wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajak masih rendah 3. Digitalisasi dan Elektronifikasi pelayanan pajak & retribusi belum optimal. 4. Pengalihan PKB dan BBNKB sebagai opsen pajak daerah tidak disertai dengan kemudahan akses sistim informasi yang memadai.	

https://jdih.pemalangkab.go.id

3.2.2. Isu Strategis

Isu strategis dapat diidentifikasi dengan analisa SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunity, Treaths*). Kekuatan (*strenght*) dan Kelemahan (*Weakness*) merupakan faktor internal yang mempengaruhi pengelolaan keuangan dan aset daerah pada BPKPAD Kabupaten Pemalang. Sedangkan peluang (Opportunity) dan tantangan (Treaths) merupakan kesempatan dan ancaman yang berasal dari eksternal, yang dapat mempengaruhi atau mendukung pencapaian tujuan BPKPAD Kabupaten Pemalang. Adapun kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah pada BPKPAD Kabupaten Pemalang sebagai berikut:

a. *Kekuatan/ Potensi (Strength)*
   1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah;
   2. Tersedianya alokasi anggaran yang cukup untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah;
   3. Adanya pedoman, sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. *Kelemahan (Weaknes)*
   1. Keterbatasan kewenangan dan otorisasi pengembangan pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPD);
   2. Masih terbatasnya sarana prasarana penunjang kerja;
   3. Kurangnya SDM yang menguasai akuntansi, tekhnologi informasi, pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan barang milik daerah;
   4. Belum adanya pejabat fungsional yang menangani appraisal barang milik daerah serta pelaksana khusus yang menangani publikasi dan transparansi pelaksanaan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah;
   5. Belum adanya pemetaan potensi aset yang dapat disewakan berbasis tekhnologi informasi, untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh data dan informasi tentang aset daerah yang dapat disewa;
   6. Akuntabilitas data aset daerah belum memadai;
   7. Belum maksimalnya publikasi kemudahan pembayaran pajak daerah kepada Masyarakat;
   8. Belum semua pengelolaan retribusi daerah dilakukan dengan mekanisme non tunai.

c. *Kesempatan/ Peluang (Oportunity)*
   1. Perkembangan teknologi dan sistem informasi yang begitu pesat sebagai salah satu tools untuk menunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

https://jdih.pemalangkab.go.id

2. Komitmen pemerintah pusat untuk melakukan reformasi pengelolaan keuangan, pengelolan pendapatan dan pengelolaan aset daerah
3. Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah, termasuk kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah dan aset daerah;
4. Adanya amanat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait percepatan proses sertifikasi tanah milik Pemkab Pemalang dan pengelolaan pendapatan daerah secara non tunai;

d. *Tantangan/Ancaman (Treath)*

1. Disrupsi teknologi yang menuntut keterbukaan dan percepatan akses informasi pengelolaan keuangan daerah;
2. Perkembangan inovasi pemerintah daerah lain dalam aspek inovasi pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
3. Pengakuan dari masyarakat terhadap aset milik Pemerintah Kabupaten Pemalang secara sepihak;
4. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat untuk mewujudkan good governance yang dapat melayani dengan cepat, tepat, dan akurat;
5. Adanya keinginan publik atas kemudahan akses data pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Isu strategis merupakan pemahaman terhadap permasalahan pembangunan dan isu-isu yang relevan sebagai acuan penting dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Pemalang. Isu strategis merupakan bagian dari tantangan ataupun peluang dan harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan mengingat begitu besarnya dampak yang ditimbulkan pada masa yang akan datang. Identifikasi permasalahan pembangunan dan analisis isu strategis akan menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak diinginkan di masa depan. Sehingga perencanaan pembangunan di Kabupaten Pemalang akan semakin efektif. Oleh sebab itu, identifikasi permasalahan pembangunan dan analisis isu strategis menjadi bagian yang sangat penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Pemalang.

Isu strategis pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang terkait dengan pelaksanaan fungsi BPKPAD Kabupaten Pemalang adalah belum optimalnya tata kelola Pemerintahan Daerah. Tata kelola pemerintahan daerah yang belum optimal berkaitan erat dengan implementasi reformasi birokrasi yang belum optimal. Reformasi birokrasi dimaknai sebagai usaha melakukan perbaikan kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas regulasi, efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik kepada

https://jdih.pemalangkab.go.id

masyarakat, jika hal tersebut terpenuhi maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang, maka peranan BPKPAD sangat penting dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta evaluasi dan monitoring. Peran penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumberdaya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan. Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis, baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id

TABEL 2.10
ISU STRATEGIS BPKPAD KABUPATEN PEMALANG

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Adanya komitmen dari Pimpinan daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat dan Digitalisasi pelayanan publik	Sistim Informasi pengelolaan keuangan daerah belum terintegrasi dengan pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan barang milik daerah, kinerja dan evaluasinya.	Belum optimalnya budaya e-government dan upaya peningkatan pendapatan daerah	Resiko Kegagalan Cyber Security	Transformasi Tata Kelola yaitu kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik dan pemberdayaan masyarakat sipil.	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Akuntabilitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah
Masyarakat Kabupaten Pemalang dengan	Masih rendahnya PAD pajak daerah yang	Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan	Ekonomi	Ketimpangan antar wilayah Jawa dan luar Jawa masih tinggi	Kualitas hidup dan daya saing	Reformasi tata kelola pemerintahan

https://jdih.pemalangkab.go.id

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
jumlah penduduk yang besar dan memiliki kondisivitas daerah yang baik, solidaritas sosial dan masyarakat yang agamis dan toleran.	diterima namun angka belanja daerah tinggi	terhadap keberlanjutan ekonomi daerah			sumberdaya manusia	berbasis digitalisasi
Pajak daerah	Piutang pajak	Belum optimalnya budaya e-government dan upaya peningkatan pendapatan daerah	Resesi ekonomi	Ketidakpastian hukum	Opsen PKB dan BBNKB belum bisa mendukung peningkatan PAD secara signifikan	Belum optimalnya pengelolaan pajak daerah berbasis teknologi informasi.
Retribusi Daerah	Realisasi Penerimaan	Belum optimalnya budaya e-	Resesi ekonomi	Ketidakpastian hukum	Kebocoran penerimaan	Belum optimalnya

https://jdih.pemalangkab.go.id

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
	Retribusi Daerah rendah	government dan upaya peningkatan pendapatan daerah			retribusi daerah	implementasi digitalisasi retribusi daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran BPKPAD Kabupaten Pemalang

Sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah berperan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang. Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih di Kabupaten Pemalang, dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang didukung dengan dana yang tercantum pada APBD Kabupaten Pemalang. Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati periode Jabatan 2025-2030 adalah **PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL DAN MULYA.**

1. **BERSIH**
   Mengandung arti bahwa Pemalang menjadi Kabupaten yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan;
2. **CAKAP**
   Dimaknai Pemalang memiliki sumber daya manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan masyarakat pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
3. **HANDAL**
   Dimaknai kolaborasi pasangan pemimpin yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.
4. **MULYA**
   Artinya maju, unggul, lestari dan berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Mencermati makna dari masing-masing visi tersebut maka BPKPAD Kabupaten Pemalang mendukung Visi yang pertama yaitu Bersih. BPKPAD Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bertujuan untuk mewujudkan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. BPKPAD mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, berintegritas, transparan dan akuntabel dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas.

Visi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030 dijabarkan dalam beberapa misi untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan yang mendukungnya. Misi dalam perencanaan pembangunan memiliki beberapa fungsi antara lain : mengarahkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai visi, mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan ke dalam satu kesatuan yang utuh, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Adapun misi yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. **RESIK**
   Artinya menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih. Masyarakat Kabupaten Pemalang mempunyai budaya hidup bersih, kesadaran untuk mewujudkan lingkungan yang bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga, termasuk pengelolaan sampah yang baik.
2. **HIJAU**
   Artinya meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan. Meningkatnya kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sektor unggulan, mewujudkan ekonomi hijau yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas yang ramah lingkungan, industri hijau yang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM yang mampu menjadi UMKM yang mampu mengolah sampah yang dihasilkan.
3. **APIK**
   Mewujudkan Kabupaten Pemalang yang dikelola dengan baik dan ramah, menciptakan penataan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan pemukiman kumuh yang dilaksanakan mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.
4. **PEDULI**
   Mewujudkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat, mewujudkan kualitas SDM dari sisi pendidikan dan kesehatan untuk menjadi SDM yang memiliki karakter dan berprestasi.

https://jdih.pemalangkab.go.id

5. **SILATURAHMI**
   Mewujudkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera. Pemerintah Kabupaten Pemalang meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, saling menghormati dan tepa selira.
6. **ORGANISATORIS**
   Mewujudkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Dengan kata lain, Pemerintah Kabupaten Pemalang mewujudkan good governance, clean governance dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.
7. **DIGITALISASI**
   Memanfaatkan teknologi informasi dan perkembanganya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar. Pemerintah Kabupaten Pemalang mendoring terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan reformasi birokrasi.
8. **IKHLAS**
   Artinya menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat pemalang untuk semua kalangan. Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman dan aman dalam kehidupan spiritual, mengembangkan kearifan dan budaya lokal.

Dokumen Rencana Strategis merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD yang disesuaikan dengan pelaksanaan fungsi perangkat daerah. Sehingga tujuan dan sasaran beserta indikator yang tercantum pada renstra harus selaras dengan tujuan dan sasaran daerah yang tercantum pada RPJMD. Tujuan dan sasaran diterjemahkan dengan arah kebijakan dan strategi. Sehingga arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah harus mendukung arah kebijakan dan strategi pemerintah daerah. Hubungan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi Pemda yang tercantum pada RPJMD dengan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi perangkat daerah yang tercantum pada Renstra, sebagaimana ilustrasi berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Gambar 3.1.
Konsep Renstra Perangkat Daerah

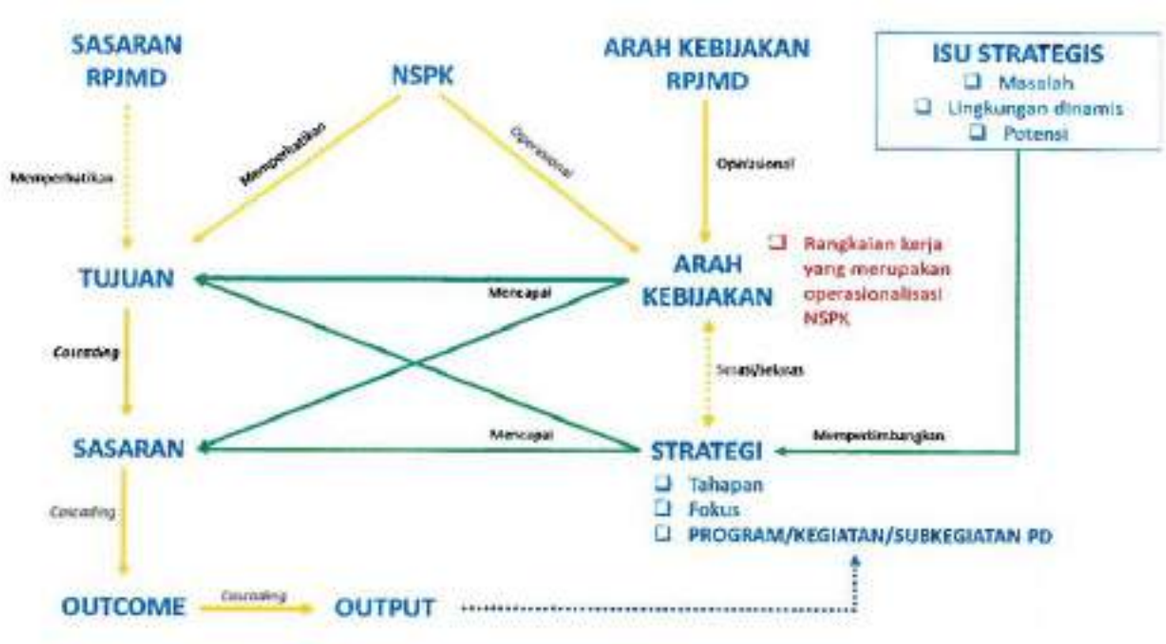

Pelaksanaan tugas pada BPKPAD Kabupaten Pemalang mendukung visi BERSIH yang dijabarkan dalam misi ORGANISATORIS. Artinya bahwa pelaksanaan fungsi BPKPAD Kabupaten Pemalang bermuara pada terwujudnya pemerintahan yang baik (Good Governance) bersih dan melayani, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.

Pada dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disebutkan 5 (lima) tujuan daerah beserta sasarannya sebagai berikut :

1. Tujuan Daerah : Meningkatnya kualitas lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman;
   Dengan Sasaran Daerah :
   a. Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan serta pengelolaan sampah.
2. Tujuan Daerah : Meningkatkan daya saing pembangunan daerah;
   Dengan Sasaran Daerah :
   a. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi lokal;
   b. Meningkatnya kualotas SDM daerah;
   c. Meningkatnya kemandirian pangan;
   d. Meningkatnya pengendalian harga bahan pokok penting;
   e. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata;
   f. Meningkatnya kualitas pembangunan desa dan kawasan pedesaan;

https://jdih.pemalangkab.go.id

g. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender;
h. Meningkatnya kualitas riset dan inovasi;

3. Tujuan Daerah : Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
   Dengan Sasaran Daerah :
   a. Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat;
   b. Meningkatnya penanganan pengangguran.
4. Tujuan Daerah : Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis yang menciptakan keamanan dengan nilai nilai budaya dan kegotongroyongan;
   Dengan Sasaran Daerah :
   a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hidup berdampinagn secara harmonis dan kondusif;
   b. Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana;
   c. Meningkatnya kemajuan kebudayaan lokal.
5. Tujuan Daerah : Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel.
   Dengan Sasaran Daerah :
   a. Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien dengan pelayanan publik yang baik.

BPKPAD mendukung tujuan daerah yang ke-5 yaitu Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel dengan sasaran daerah meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien dengan pelayanan publik yang baik.

Berdasarkan visi, misi, tujuan daerah dan sasaran daerah pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang didukung oleh pelaksanaan fungsi BPKPAD Kabupaten Pemalang tersebut maka BPKPAD Kabupaten Pemalang menetapkan tujuan dan sasaran yang selaras dengan visi, misi, tujuan daerah dan sasaran daerah yang didukungnya. Adapun Tujuan BPKPAD Kabupaten Pemalang adalah "***Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah***". Tujuan tersebut memiliki indikator Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur atau sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dalam jangka waktu tahunan sampai lima tahun mendatang. Sasaran merupakan hasil yang dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dalam rangka mencapai tujuan perangkat daerah maka sasaran dan indikator daerah tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang menetapkan 2 Sasaran BPKPAD yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
   Dengan indikator :
   a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
   b. Nilai SAKIP
2. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
   Dengan indikator :
   a. Persentase Mandatory Spending yang terpenuhi sesuai ketentuan
   b. Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPA)
   c. Rasio PAD terhadap Pendapatan daerah

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dengan indikator dapat dilihat pada Tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.1
TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA BPKPAD KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2025-2029

Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET KINERJA TAHUN KE-						Kondisi Akhir Renstra
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien dengan pelayanan public yang baik	Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Jumlah hasil pengukuran masing-masing dimensi IPKD (Permendagri No 19 Tahun 2020)	Indeks	70,1277	75	75	75	75	75	75	75
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah hasil survey kepuasan Masyarakat atas layanan BPKPAD per semester dibagi 2.	Indeks	86,63	88	88	88	88	88	88	88
			Nilai SAKIP	LHE APIP atas evaluasi SAKIP perangkat daerah	Nilai	64,15	69	75	75	75	75	75	75
		Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Mandatory Spending yang terpenuhi sesuai ketentuan	Jumlah mandatory spending yang telah terpenuhi sesuai ketentuan dibandingkan dengan jumlah mandatory spending yang harus dipenuhi kali 100% (UU No 1 Tahun 2025 dan KMK No 24 Tahun 2024)	%	66,67%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
			Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPA)	Jumlah hasil pengukuran masing-masing komponen penghitungan IPA	Indeks	2,6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
			Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	Jumlah PAD dibagi Jumlah total pendapatan pada APBD dikali 100%	%	14,166	18,909	20	20	20	20	20	20

https://jdih.pemalangkab.go.id

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang.

Sedangkan arah kebijakan Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Nilai, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi BPKPAD Kabupaten Pemalang dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang.

Strategi Pemerintah Kabupaten Pemalang yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 terkait dengan sasaran daerah “Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah” adalah :

1. Peningkatan akuntabilitas Pembangunan melalui peningkatan kualitas perencanaan, kinerja dan pelaporan;
2. Peningkatan maturitas sistem pengendalian intern melalui peningkatan komitmen pemerintah dalam menjalankan Pembangunan, penguatan kebijakan dan regulasi, peningkatan kapabilitas APIP, penigkatan kualitas dan profesionalisme pegawai, penguatan manajemen resiko, digitalisasi serta evaluasi berkelanjutan.
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP), mewujudkan pelayanan berbasis digital, mudah dan murah.
4. Penguatan Sistem Informasi dan Digitalisasi Pelayanan; Meliputi pembangunan dan pengintegrasikan sistem informasi pengelolaan PAD yang terpusat dan real time. Pengembangan aplikasi layanan pajak online untuk wajib pajak (e-tax, e-SPPT, e-PBB, e-BPHTB). Penerapan dashboard transparansi penerimaan PAD berbasis web yang dapat diakses publik.
5. Peningkatan Kualitas Data dan Monitoring Transaksi. Pemutakhiran database objek dan subjek pajak secara berkala. Integrasi data dengan instansi eksternal seperti BPN, DPMPTSP, dan Dukcapil. Audit internal secara berkala atas data dan realisasi penerimaan pajak.
6. Menyesuaikan regulasi pemungutan PAD agar selaras dengan UU No. 1 Tahun 2022 dan Perda No. 7 Tahun 2023. Penetapan tarif dan dasar pengenaan pajak yang adil dan terbuka untuk publik.

https://jdih.pemalangkab.go.id

7. Peningkatan Kapasitas dan Integritas SDM**.** Pelatihan berkala untuk aparatur pajak terkait akuntabilitas, audit publik, dan pelayanan prima. Penerapan kode etik dan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system). Evaluasi kinerja pegawai berbasis hasil dan integritas.
8. Penguatan Peran Pengawasan Masyarakat dan Stakeholder. Penyediaan kanal pengaduan dan pelaporan masyarakat secara daring. Pelibatan unsur masyarakat, media, dan LSM dalam pengawasan pemungutan PAD. Forum diskusi atau konsultasi publik rutin untuk membahas kebijakan pajak/retribusi. Melakukan sosialisasi *door to door* atau melalui forum warga desa/kelurahan mengenai kewajiban pajak dan manfaatnya bagi pembangunan lokal.Menyediakan layanan konsultasi pajak keliling (mobil pajak) ke pasar-pasar rakyat, sentra UMKM, dan lokasi wisata.
9. Pemberian insentif kepada wajib pajak, desa atau kecamatan yang membayar pajak tepat waktu dan bagi desa dan kecamatan yang mampu memberi kontribusi untuk peningkatan pajak daerah.

Sedangkan arah kebijakan yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 terkait dengan sasaran daerah "Meningkatkan kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien dengan pelayanan publik yang baik" serta selaras dengan pelaksanaan fungsi BPKPAD adalah "Peningkatan pengelolaan keuangan daerah difokuskan pada peningkatan pendapatan asli daerah dan pengelolaan keuangan serta aset daerah yang mendorong PAD".

Selaras dengan strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang tercantum pada dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 maka Strategi BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah "meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan barang milik daerah". Adapun pentahapan strategi Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.2 Penahapan Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
➢ Mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah dengan aplikasi yang mudah diakses oleh Masyarakat	➢ Terpenuhinya Mandatory spending sesuai ketentuan. ➢ Pengelolaan aset daerah yang mendukung peningkatan PAD secara signifikan. ➢ Publikasi yang optimal atas implementasi digitasilisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah	➢ Kualitas pencairan dana yang optimal dimana semua transaksi keuangan daerah dilakukan dengan mekanisme non tunai. ➢ Kualitas Pengamanan aset daerah yang optimal, dibuktikan dengan peningkatan persentase aset daerah yang mempunyai bukti kepemilikkan. ➢ Intensifikasi dan diversifikasi potensi pendapatan asli daerah berbasis teknologi informasi.	➢ Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah dengan implementasi sistim pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang terintegrasi dan akuntabel. ➢ Status penggunaan BMD telah 100% ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ➢ Kontribusi signifikan dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD.	➢ APBD disusun untuk mendorong peningkatan kemandirian keuangan daerah. ➢ Pengelolaan BMD telah berbasis tekhnologi informasi yang akuntabel. ➢ Mewujudkan percepatan transformasi pengelolaan pendapatan daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id

1. Tahap I (Tahun 2026)
   - Mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah dengan aplikasi yang mudah diakses oleh Masyarakat, dilaksanakan dengan cara :
     a. Aktif mempublikasikan secara berkala laporan/dokumen pengelolaan keuangan termasuk pendapatan dan aset daerah ke website Pemkab Pemalang, Website BPKPAD serta media sosial lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat;
     b. Mempublikasikan regulasi/pedoman/SOP layanan pengelolaan keuangan daerah termasuk pengelolaan pendapatan dan pengelolaan aset daerah melalui website Pemkab Pemalang, Website BPKPAD serta media sosial lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat;
     c. Meningkatkan implementasi sistim informasi atas layanan BPKPAD;
     d. Digitalisasi Layanan penerimaan pajak dan retribusi daerah;
     e. Akuntabilitas penerimaan pendapatan sewa berbasis teknologi informasi;
     f. Penyediaan media pengaduan atas layanan BPKPAD;
     g. Aktif melaksanakan survey kepuasan masyarakat secara berkala;

2. Tahap II (Tahun 2027)
   - Terpenuhinya Mandatory spending sesuai ketentuan, dilaksanakan dengan upaya :
     a. Melaksanakan efisiensi belanja operasi;
     b. Mengendalikan belanja pegawai dengan memetakan kebutuhan riil pegawai secara cermat dan mengelola tunjangan kinerja agar tepat tujuan dan tepat sasaran;
     c. Mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik, minimal sesuai ketentuan regulasi;
     d. Mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah dalam rangka meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD;
     e. Melakukan tagging sumber dana belanja pada SIPD dalam rangka akuntabilitas pemenuhan mandatory spending;
     f. Memfokuskan alokasi anggaran untuk pelayanan dasar (Pendidikan dan Kesehatan) terpenuhi sesuai ketentuan.
   - Pengelolaan aset daerah yang mendukung peningkatan PAD secara signifikan.
     a. Melaksanakan pemanfaatan aset daerah dengan sistim sewa berbasis teknologi informasi;
     b. Mengevaluasi regulasi/SOP/Pedoman Teknis pemanfaatan aset daerah agar lebih simple dan mudah dilaksanakan oleh Masyarakat penyewa;
     c. Menyesuaikan standar harga sewa aset daerah secara berkala;
     d. Menyusun potensi aset daerah yang dapat disewakan serta menggali sumber-sumber aset daerah yang berpotensi untuk disewakan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

e. Bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait pelaksanaan sosialisasi kepada Masyarakat tentang prosedur, ketentuan dan sanksi pemanfatan aset daerah dengan sistim sewa.
f. Pengenaan sanksi terhadap oknum pegawai pelaku fraud dalam pelaksanaan pemanfaatan aset daerah dengan sistim sewa.

- Publikasi yang optimal atas implementasi digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan cara :
  a. Mengaktifkan peran website dan media sosial;
  b. Melaksanakan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat;
  c. Mengaktifkan pelaksanaan publikasi melalui mobil layanan;
  d. Memanfaatkan media iklan atau selebaran pada tempat-tempat umum.

3. Tahap III (Tahun 2028)
   - Kualitas pencairan dana yang optimal dimana semua transaksi keuangan daerah dilakukan dengan mekanisme non tunai.
     a. Mendorong semua perangkat daerah untuk menggunakan KKPD pada setiap transaksi keuangan daerah;
     b. Menyusun regulasi yang meminimalkan transaksi keuangan dilakukan secara tunai;
     c. Menyusun Petunjuk Teknis terkait persentase uang persediaan dengan sistim Ganti uang (GU) dan KKPD.
   - Kualitas Pengamanan aset daerah yang optimal, dibuktikan dengan peningkatan persentase aset daerah yang mempunyai bukti kepemilikkan, dilakukan denagn cara :
     a. Melakukan inventarisasi aset daerah yang belum memiliki bukti kepemilikan;
     b. Mencatat secara cermat pada sistim aplikasi terkait data aset daerah yang telah memiliki bukti kepemilikan;
     c. Melakukan koordinasi dengan Kementrian ATR/BPN terkait pemrosesan bukti kepemilikan tanah Pemda;
     d. Melakukan inventarisasi data pengadaan kendaraan dinas pada perangkat daerah dalam rangka memonitoring pengurusan bukti kepemilikan;
     e. Melaksanakan rekonsiliasi atau sensus barang milik daerah.
   - Intensifikasi dan diversifikasi potensi pendapatan asli daerah berbasis teknologi informasi.
     a. Menggali potensi PAD dengan melakukan monitoring sumber-sumber PAD;
     b. Menyusun potensi PAD dalam rangka mengintensifkan penerimaan PAD;
     c. Meningkatkan target PAD;
     d. Mengelola PAD berbasis digital/teknologi informasi.

https://jdih.pemalangkab.go.id

e. Meminimalkan penerimaan PAD secara tunai dalam rangka mencegah terjadinya Fraud.

4. Tahap IV (Tahun 2029)
   - Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah dengan implementasi sistim pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang terintegrasi dan akuntabel, dilakukan dengan cara melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia tentang kemungkinan integrasi sistem pengelolaan pendapatan dan sistem pengelolaan BMD dengan SIPD;
   - Status penggunaan BMD telah 100% ditetapkan dengan Keputusan Bupati, aktivitas yang dilakukan adalah :
     a. Melaksanakan inventarisasi BMD pada Pengguna Barang termasuk status penggunaanya;
     b. Mengkonsolidasikan status penggunaan BMD pada semua OPD di Kabupaten Pemalang;
     c. Menyusun Keputusan Bupati tentang penetapan status penggunaan BMD dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian siapa yang bertanggungjawab atas barang milik daerah.
   - Kontribusi signifikan dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD, aktivitas yang dilakukan untuk mendukung penahapan tersebut adalah :

     Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan berbasis teknologi informasi dan digitalisasi untuk menjaga akuntabilitas penerimaan pendapatan daerah dari sisi pajak daerah dan retribusi daerah;
     a. Menyusun SOP dengan mekanisme yang sederhana dan mudah;
     b. Publikasi ke masyarakat terkait pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dilakukan *online;*
     c. Menggali secara intens potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan;
     d. Menetapkan kebijakan tarif pajak daerah dan retribusi daerah dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta menggunakan data realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun-tahun sebelumnya;
     e. Menyediakan loket pelayanan dengan petugas yang ramah melayani serta menerapkan senyum, sapa dan salam;
     f. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai agar pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilakukan secara *mobile* atau jemput bola ke masyarakat.

https://jdih.pemalangkab.go.id

5. Tahap V (Tahun 2030)
   - APBD disusun untuk mendorong peningkatan kemandirian keuangan daerah. Penahapan renstra ini dilakukan dengan cara :
     a. Melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi penerimaan PAD;
     b. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan PAD dengan mendorong implementasi penerimaan PAD secara non tunai;
     c. Meningkatkan kompetensi petugas pemungut PAD;
     d. Memberikan reward terhadap Perangkat Daerah pengelola Retribusi Daerah yang berhasil meningkatkan target secara signifikan dan berhasil mencapai target tersebut;
     e. Memberikan reward terhadap wajib pajak disiplin dalam membayar pajak dan pembayaran dilakukan tepat waktu;
     f. Menyusun regulasi dan pedoman pengelolaan PAD dalam rangka meningkatkan penerimaan PAD.
   - Pengelolaan BMD telah berbasis tekhnologi informasi yang akuntabel.
     Pengelolaan BMD seringkali dipandang sebelah mata, baik oleh pemerintah sebagai pengelola dan/atau pengguna maupun oleh stakeholder dan pemeriksa. Padahal, ketika keuangan Pemerintah Daerah sedang *collaps,* BMD dapat dicadangkan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kondisi keuangan yang terpuruk tersebut. Pengelolaan BMD merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan. pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka mewujudkan pengelolaan BMD berbasis teknologi informasi antara lain sebagai berikut :
     a. Menyediakan sistim informasi pengelolaan BMD yang menyeluruh termasuk mengintegrasikan perencanaan kebutuhan BMD dengan penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran);
     b. Membangun sistim pemanfaatan BMD yang mendukung implementasi transaksi keuangan dari sisi penerimaan pendapatan dilakukan secara non tunai;
     c. Transparansi dan publikasi data BMD kepada masyarakat dalam rangka akuntabilitas pendapatan sewa;
     d. Melaksanakan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyediaan sistim informasi pengelolaan BMD yang handal, akuntabel dan komprehensif;
     e. Melaksanakan peningkatan kompetensi pengurus barang dalam penggunaan teknologi informasi pengelolaan BMD.
   - Mewujudkan percepatan transformasi pengelolaan pendapatan daerah. Transformasi pengelolaan pendapatan bertujuan memaksimalkan potensi PAD dan memastikan pengelolaan keuangan yang lebih efektif. Selain itu, transformasi pengelolaan pendapatan

https://jdih.pemalangkab.go.id

bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pendapatan daerah yang optimal akan mendukung pendanaan program-program Pemerintah Kabupaten Pemalang yang pada akhirnya berujung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Langkah-langkah yang dilakukan adalah :

a. Peningkatan infrastruktur dan teknologi informasi untuk mendukung sistem pengelolaan pendapatan daerah yang modern;
b. Perbaikan dan harmonisasi regulasi (peraturan daerah dan peraturan bupati) untuk mendukung optimalisasi pendapatan dan kepastian hukum;
c. Reformasi proses bisnis atau SOP yaitu penataan ulang proses kerja dan prosedur operasional dalam pemungutan dan pengelolaan pendapatan agar lebih efektif dan efisien;
d. Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan meningkatkan kompetensi ASN yang bertugas mengelola pendapatan agar mampu berdaptasi dengan teknologi dan tantangan baru;
e. Peningkatan pengawasan dengan penguatan audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan mencegah kebocoran pendapatan daerah (Fraud).

Arah kebijakan Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.3

Arah Kebijakan Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NILAI, PROSEDUR, STANDAR DAN KRITERIA (NSPK)	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BPKPAD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Peningkatan pengelolaan keuangan daerah difokuskan pada peningkatan pendapatan asli daerah dan pengelolaan keuangan serta aset yang mendorong PAD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan mengoptimalkan potensi daerah untuk mencapai kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan PAD dan pengelolaan dana perimbangan, optimalisasi pengelolaan kekayaan daerah serta pengelolaan belanja dan pembiayaan yang efektif, efisien, transparan, tertib dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk kepentingan Masyarakat.	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas maka dapat disandingkan pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang tercantum pada Dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan BPKPAD Kabupaten Pemalang yang tercantum pada Dokumen Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.4
Persandingan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pada RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra BPKPAD Tahun 2025-2029

Visi : Bersih bagian dari visi BERCAHAYA (Bersih, Cakap, Handal dan Mulya)							
Misi : Organisatoris (Meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi)							
RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029				RENSTRA BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien dengan pelayanan publik yang baik	Peningkatan kualitas perencanaan, kinerja dan pelaporan.	Peningkatan pengelolaan keuangan daerah difokuskan pada peningkatan pendapatan asli daerah dan pengelolaan keuangan serta aset yang mendorong PAD.	Meningkatnya kualitas kinerja tata Kelola keuangan daerah	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan barang milik daerah.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan mengoptimalkan potensi daerah untuk mencapai kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan PAD dan pengelolaan dana perimbangan, optimalisasi pengelolaan kekayaan daerah serta pengelolaan belanja dan pembiayaan yang efektif, efisien, transparan, tertib dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk kepentingan Masyarakat.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi oleh perangkat daerah di Kabupaten Pemalang dalam lima tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi masing-masing. Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan ditentukan program dan kegiatan serta indikator kinerja masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Program perangkat daerah Kabupaten Pemalang berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan rencana Strategis PD. Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Pada Akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh masing-masing perangkat daerah ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya makna program prioritas bagi rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan tiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja yang akan dituangkan dalam APBD. Selanjutnya pagu indikatif dialokasikan ke tiap-tiap program prioritas masing masing urusan untuk mencapai tiap-tiap indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya, masing-masing pagu menjadi patokan maksimal bagi perangkat daerah dalam menjabarkan pagu tersebut pada kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun. Program yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 terbagi dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan

https://jdih.pemalangkab.go.id

dan urusan penunjang. Kerangka perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah sebagaimana alur pada gambar berikut :

Gambar IV.1.
Kerangka perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah

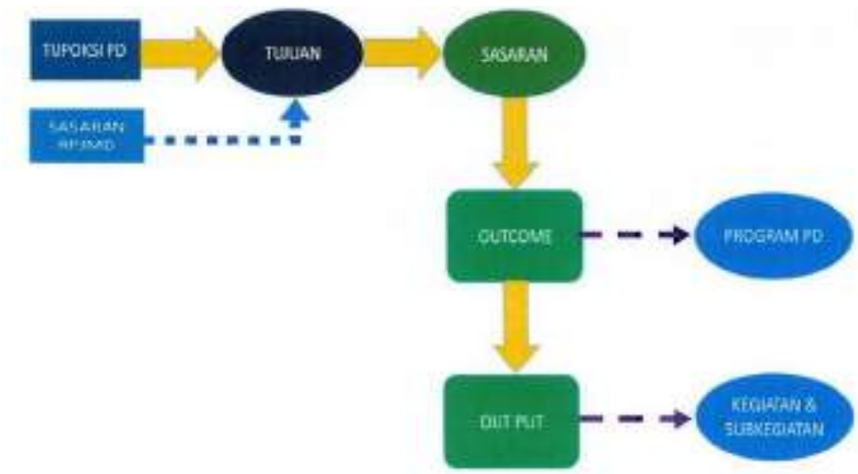

Program yang dilaksanakan oleh BPKPAD Kabupaten Pemalang termasuk dalam kategori urusan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Program tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
   Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh sekretariat BPKPAD Kabupaten Pemalang. Sasaran program penunjang adalah meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota.
   Indikator program penunjang urusan pemeritahan daerah kabupaten/kota adalah :
   a. Persentase capaian layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi.
   b. Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi.

   Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota mewadahi kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung perencanaan, penganggaran, pelaporan dan operasional perangkat daerah termasuk pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah kewenangan pengguna anggaran. Adapun aktivitas tersebut meliputi :
   - Penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, dokumen kinerja dan dokumen evaluasi kinerja BPKPAD;
   - Pembayaran gaji dan tunjangan ASN BPKPAD;
   - Penyusunan laporan keuangan BPKPAD;
   - Penyusunan Keputusan Bupati dalam rangka penetapan pelaksanaan tugas terkait pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan pendapatan

https://jdih.pemalangkab.go.id

daerah dan pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah se-Kabupaten Pemalang;

- Penyediaan barang dan jasa untuk mendukung operasional kantor BPKPAD;
- Pengadaan belanja modal baik kendaraan, peralatan kantor, mebeler dalam rangka mendukung operasional kantor BPKPAD;
- Penyediaan jasa penunjang seperti alokasi anggaran untuk belanja listrik, air, telepon, internet, kurir, surat menyurat, jasa non ASN di BPKPAD, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) non ASN di BPKPAD;
- Pemeliharaan aset daerah milik BPKPAD

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh Bidang-bidang pada BPKPAD Kabupaten Pemalang dengan satu indikator program pada masing-masing bidang sebagai berikut :

No	Nama Bidang	Indikator Program
1	Bidang Anggaran	Persentase Penyampaian Raperda APBD sesuai ketentuan
2	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	1. Persentase SP2D yang terbit sesuai ketentuan 2. Persentase penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai ketentuan

Sasaran program pengelolaan keuangan daerah adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan program pengelolaan keuangan daerah pada bidang-bidang meliputi :

- Bidang Anggaran
  - Penyusunan Dokumen KUA PPAS dan Perubahannya;
  - Penyusunan Raperda APBD dan Perkada penjabaran APBD termasuk perubahannya;
  - Pelaksanaan desk penyusunan RKA dan perubahan RKA;
  - Penyusunan Perkada terkait penggeseran mendahului perubahan atau penggeseran setelah perubahan APBD;
  - Penyampaian Raperda APBD ke DPRD termasuk perubahannya.
  - Melakukan pemeliharaan, pengembangan dan optimalisasi sistim pengelolaan keuangan daerah dan sistim pengelolaan barang milik daerah;
  - Melakukan pembinaan terkait penggunaan sistim pengelolaan keuangan daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id

➢ Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi

- Penyusunan dan Penerbitan SP2D baik UP, LS, GU, TU, GUN dan TUN sesuai ketentuan;
- Penyusunan dokumen sistim dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
- Pengelolaan kas daerah termasuk penyusunan laporan posisi kas dan rekonsiliasi harian kas daerah;
- Penyusunan laporan pemungutan pajak yang bersumber dari belanja daerah (PFK) serta penyusunan dokumen kelengkapan pembayaran gaji ASN di Kabupaten Pemalang;
- Melaksanakan managemen kas daerah agar uang daerah pada RKUD dapat mencukupi kebutuhan belanja Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- Mengelola penempatan uang daerah dalam rangka mendukung PAD;
- Mengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan rekening operasional pada perangkat daerah sesuai ketentuan;
- Melakukan pembinaan kepada perangkat daerah terkait penatausahaan keuangan daerah yang dilakukan pada masing-masing perangkat daerah.
- Menyusun laporan realisasi keuangan secara berkala baik bulanan, triwulanan dan semesteran;
- Menyusun Laporan Keuangan Daerah yang merupakan hasil konsolidasi laporan keuangan SKPD;
- Menyusun Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- Menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD Kabupaten Pemalang;
- Menyusun regulasi terkait sistim informasi akuntansi, kebijakan akuntansi serta tentang kerugian daerah;
- Melakukan desk secara berkala atas realisasi pendapatan dan belanja SKPD;

Selain kegiatan dan sub kegiatan tersebut, Bidang Perbendaharaan melakukan kegiatan yang menjadi kewenangan PPKD yaitu :

- Menyalurkan bantuan keuangan kepada desa yang meliputi penghasilan tetap dan operasional desa yang terakomodir pada ADD, pendampingan pelaksanaan TMMD, dana desa, bantuan keuangan hasil musrenbang, bantuan keuangan yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD serta bantuan keuangan desa lainnya yang sebagian besar berwujud pembangunan fisik di desa;
- Menyalurkan Belanja Tidak Terduga yang diperuntukan bagi korban bencana karena keadaan darurat baik darurat bencana maupun darurat sosial, bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan

https://jdih.pemalangkab.go.id

sebelumnya bagi masyarakat yang terlantar dan kurang mampu yang diakomodir serta pengembalian pendapatan tahun sebelumnya.
- Menyalurkan belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa. Belanja ini merupakan kompensasi pencapaian target pajak dan retribusi yang ada di wilayah desa di Kabupaten Pemalang.
- Subkegiatan lain yang menjadi kewenangan PPKD antara lain belanja subsidi dan analisis pinjaman.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Bidang Aset Daerah dengan satu indikator program yaitu Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah. Sasaran program pengelolaan barang milik daerah adalah meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah. Pelaksanaan program pengelolaan barang milik daerah sebagai berikut :

- Melakukan pengamanan barang milik daerah berupa pemasangan patok pada tanah milik pemda, pemasangan papan identitas aset daerah pada tanah dan bangunan milik Pemda, pensertifikatan tanah milik pemda, penyimpanan bukti kepemilikan aset daerah dengan tertib, labelisasi pada aset daerah baik untuk barang dibawah pengelola barang maupun barang dibawah pengelolaan pengguna barang pada perangkat daerah;
- Penyusunan laporan barang milik daerah;
- Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang tertuang pada dokumen RKBMD dan RKPBMD;
- Melakukan pembinaan terhadap pengurus barang pada perangkat daerah;
- Melakukan inventarisasi barang milik daerah;
- Melakukan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah yang meliputi penggunaan/status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.
- Menyusun regulasi terkait pengelolaan barang milik daerah seperti peraturan daerah tentang pengelolaan BMD, Peraturan Bupati tentang pemanfaatan BMD, peraturan bupati tentang inventarisasi BMD serta regulasi lainnya yang bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan BMD.

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dilaksanakan oleh 2 Bidang pada BPKPAD Kabupaten Pemalang dengan indikator program pada masing-masing bidang sebagai berikut :

No	Nama Bidang	Indikator Program
1	Bidang Pendataan dan Penetapan	1. Persentase Persentase pertumbuhan Wajib Pajak Baru (non PBB) 2. Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital

https://jdih.pemalangkab.go.id

2	Bidang Penagihan dan Pengendalian	- Persentase Piutang Pajak yang terbayarkan

Pelaksanaan program pengelolaan pendapatan daerah pada Bidang Pendataan dan Penetapan, yaitu:

1. menyelenggarakan perencanaan, pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah sesuai prosedur pengelolaan pajak daerah guna menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Nomor Objek Pajak;
2. mengembangkan kegiatan dalam rangka koordinasi program kerja dan kegiatan pelayanan pajak daerah;
3. mengembangkan penerapan konsep pelayanan prima pelaksanaan pelayanan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek/ wajib pajak daerah;
4. mengembangkan pelaksanaan pelayanan self assessment pajak daerah;
5. mengembangkan pelaksanaan official assessment pajak daerah;
6. mengkoordinasikan penetapan piutang pajak daerah;

Sedangkan Pelaksanaan program pengelolaan pendapatan daerah pada Bidang Penagihan dan Pengendalian, yaitu:

1. menyusun rancangan regulasi pengelolaan pajak daerah;
2. menyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah;
3. menyelenggarakan pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah;
4. menyelenggarakan pelayanan penagihan, konsultasi dan penyelesaian keberatan pajak daerah
5. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
6. mengkoordinasikan penyelesaian piutang pajak daerah;

Dari 4 (Empat) program tersebut dijabarkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bidang dan sekretariat. Masing-masing kegiatan dan sub kegiatan pendukungnya merupakan tanggungjawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Sehingga tidak ada satu sub kegiatan yang diampu oleh dua bidang atau dua PPTK. Selanjutnya rincian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta outcome, output dan Indikatornya sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.1
Tabel Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan /Sasaran/Program	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien dengan pelayanan publik yang baik	Meningkatnya kualitas kinerja tata Kelola keuangan daerah				Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)		
					Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPA)		
		Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah			Persentase Mandatory Spending yang terpenuhi sesuai ketentuan		
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Penyampaian Raperda APBD sesuai ketentuan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Persentase SP2D yang terbit sesuai ketentuan		
					Persentase penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		
			Meningkatnya kualitas tata kelola anggaran	**Persentase Dokumen Penganggaran yang tersusun sesuai ketentuan**		**Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	
				Jumlah Dokumen KUA PPAS yang disusun		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
				Jumlah Dokumen		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan /Sasaran/Program	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Perubahan KUA PPAS yang disusun		PPAS	
				Jumlah Raperda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
				Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Jumlah Perkada tentang penjabaran perubahan APBD		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
			Meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaan	**Persentase Dokumen Penatausahaan dan Perbendaharaan Daerah yang tersusun sesuai ketentuan**		**Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Sub Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah	
				Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan Penyetoran Pehitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga		Sub kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
				Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan		Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban sub Kegiatan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan /Sasaran/Program	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan			
				Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota		Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas tata kelola akuntansi dan pelaporan	**Persentase Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang tersusun sesuai ketentuan**		**Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	
				Jumlah laporan pertanngungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, Triwulanan dan semesteran		Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
				Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Daerah yang terkonsolidasi		Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	
				Jumlah Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan /Sasaran/Program	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Laporan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
				Jumlah Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	
				Jumlah Dokumen Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	
				Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas penyaluran belanja penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	**Persentase Tersalurkannya Belanja penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah**		**Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	
				Jumlah Laporan hasil analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah		Sub kegiatan analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan /Sasaran/Program	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman Pemerintah Daerah		Sub kegiatan analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman Pemerintah Daerah	
				Jumlah Lap[oran Hasil Penyusunan Kebijakan dan alokasi subsidi		Sub kegiatan penyusunan kebijakan dan alokasi subsidi	
				Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten ke desa		Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	
			Meningkatya kualitas pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah	**Persentase implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**		**Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	
				Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bisdang Keuangan Daerah		Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah	
				Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan sistem informasi pemerintah daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten		Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas		Persentase tanah milik Pemda yang	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan /Sasaran/Program	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			pengelolaan barang milik daerah		telah bersertifikat		
			Meningkatnya kualitas tata Kelola aset daerah	**Persentase Dokumen Pengelolan BMD yang disusun sesuai Ketentuan**		**Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	
				Jumlah Dookumen Standar Harga yang disusun		Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	
				Jumlah Dokumen Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun		Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	
				Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD	
				Jumlah Dokumen kebijakan pengelolaan barang milik daerah		Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				Jumlah Laporan Penatausahaan BMD		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	
				Jumlah Laporan Kegiatan inventarisasi BMD		Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Pengamanan BMD		Sub Kegiatan Pengamanan BMD	
				Jumlah Laporan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahbukuan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD		Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	
				Jumlah Laporan BMD		Sub Kegiatan Penyusunan Laporan BMD	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan /Sasaran/Program	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				yang disusun			
				Jumlah Orang yang mengikuti kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Rasio PAD terhadap total Pendapatan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Terkelolanya pendapatan daerah	**Prosentase aktivitas pengelolaan pendapatan daerah yang terlaksana**		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				Jumlah dokumen penganggaran dan penghitungan potensi pajak daerah yang disusun (dokumen)		Sub Kegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah	
				Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
				Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya		Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
				Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	
				Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
				Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi		Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah		Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
				Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
				Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan /Sasaran/Program	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Nilai SAKIP		
			Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota		1. Persentase capaian layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi 2. Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
			Tersusunnya laporan/dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	
				Jumlah Dokumen DPA		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan /Sasaran/Program	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi	**Persentase laporan/dokumen keuangan yang tersusun sesuai regulasi**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
				Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Terlaksananya administrasi kepegawaian sesuai regulasi	**Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
				Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Terlaksananya fasilitasi Administratif perangkat daerah	**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah sesuai regulasi**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan /Sasaran/Program	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			sesuai regulasi				
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantior yang disediakan		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di sediakan		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Sub Kegiatan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional & Lapangan	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Tersedianya layanan penunjang urusan pemerintah daerah	**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan /Sasaran/Program	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat Menyurat	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
				Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya.		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dirumuskan beserta outcome, output dan indikatornya selanjutnya dijabarkan kembali ke dalam perencanaan kebutuhan anggaran selama lima tahun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan rencana kegiatan yang mungkin dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Kebutuhan anggaran selama lima tahun ini menjadi pagu indikatif BPKPAD dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja BPKPAD tiap tahunnya.

Adapun pagu indikatif program, kegiatan dan sub kegiatan BPKPAD Kabupaten Pemalang, tercantum pada tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan
BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	2024		2025		2026		2027		2028		2029	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	**Meningkatnya capaian perencanaan, keuangan dan layanan umum kepegawaian**	**persentase capaian perencanaan dan keuangan**	**%**	**100**	**11,774,872,864**	**100**	**13,116,423,050**	**100**	**24,335,445,752**	**100**	**32,359,266,359**	**100**	**32,359,266,359**	**100**	**32,359,266,359**
			persentase capaian layanan umum dan kepegawaian	**%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai regulasi**	**Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi**	**%**		86,046,109		**17,758,380**	**100**	**18,740,000**	**100**	**21,389,860**	**100**	**21,389,860**	**100**	**21,389,860**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		11,825,000		5,387,400		3,520,000		5,387,400		5,387,400		5,387,400
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		4,182,500		2,244,260		1,700,000		2,244,260		2,244,260		2,244,260
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		4,840,000		2,114,800		3,520,000		2,114,800		2,114,800		2,114,800
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		4,000,000		2,155,760		2,400,000		2,155,760		2,155,760		2,155,760
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		4,000,000		2,268,520		5,900,000		5,900,000		5,900,000		5,900,000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		57,198,609		3,587,640	1	1,700,000		3,587,640		3,587,640		3,587,640
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi**	**Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi**	**%**		10,079,418,427		**11,339,269,560**		**16,253,917,752**		**19,888,112,049**		**19,888,112,049**		**19,888,112,049**

https://jdih.pemalangkab.go.id

7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		10,014,299,359		11,335,013,100		16,221,083,752		19,705,278,049		19,705,278,049		19,705,278,049
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen						30,134,000		180,134,000		180,134,000		180,134,000
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		2,952,000		1,708,760		1,700,000		1,700,000		1,700,000		1,700,000
9	Koordinas dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		62,167,068		2,547,700		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**Kegiatan**		286,712,474		**263,892,810**		**411,276,000**		**861,276,000**		**861,276,000**		**861,276,000**
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		7,198,000		7,198,000		10,500,000		10,500,000		10,500,000		10,500,000
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		2,643,000		3,704,250		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		85,519,300		88,667,960		124,000,000		324,000,000		324,000,000		324,000,000
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		18,468,000		13,410,000		35,000,000		35,000,000		35,000,000		35,000,000
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		3,060,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan						5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		166,824,174		145,512,600		228,376,000		478,376,000		478,376,000		478,376,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	**Unit**		269,479,043		**751,884,000**		**6,005,000,000**		**9,251,884,000**		**9,251,884,000**		**9,251,884,000**
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		0		721,884,000		6,000,000,000		9,221,884,000		9,221,884,000		9,221,884,000

https://jdih.pemalangkab.go.id

19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		269,479,043		30,000,000		5,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan**	**Laporan**		502,136,473		**617,400,000**		**1,429,900,000**		**1,979,900,000**		**1,979,900,000**		**1,979,900,000**
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		2,000,000		2,000,000		12,000,000		12,000,000		12,000,000		12,000,000
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		150,197,043		187,600,000		637,600,000		987,600,000		987,600,000		987,600,000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									2,500,000		2,500,000		2,500,000		2,500,000
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		349,939,430		427,800,000		777,800,000		977,800,000		977,800,000		977,800,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dilaksanakan pemeliharaan**	**Unit**		340,447,950		**126,218,300**		**216,612,000**		**356,704,450**		**356,704,450**		**356,704,450**
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		82,806,500		75,013,850	50	175,500,000		275,500,000		275,500,000		275,500,000
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		30,420,000		29,280,000	12	27,000,000		49,280,000		49,280,000		49,280,000
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		217,228,000		11,931,000	3	12,000,000		21,931,000		21,931,000		21,931,000
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		9,993,450		9,993,450	3	2,112,000		9,993,450		9,993,450		9,993,450
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	**Meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah**	Persentase pertumbuhan Wajib Pajak Baru (non PBB)	**%**	21	**2,218,142,232**	20	**2,137,866,635**	20	**1,755,400,000**	20	**2,137,866,635**	20	**2,137,866,635**	20	**2,137,866,635**
			Persentase Piutang yang terbayarkan	**%**	8		10		10		10		10		10	
			Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	**%**	100		100		100		100		100		100	
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	**Terkelolanya pendapatan daerah**	**Jumlah aktivitas pengelolaan pendapatan daerah**	**Rp**		2,218,142,232		**2,137,866,635**		**1,755,400,000**		**2,137,866,635**		**2,137,866,635**		**2,137,866,635**
28	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penganggaran dan penghitungan potensi pajak daerah yang disusun (dokumen)	Dokumen		11,162,000		4,625,000	2	9,157,500	2	9,157,500	2	9,157,500	2	9,157,500

https://jdih.pemalangkab.go.id

29	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen		83,279,367		227,907,750	2	48,870,750	2	48,870,750	2	48,870,750	2	48,870,750
30	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan		310,361,280		249,357,300	6	163,000,000	6	254,192,400	6	254,192,400	6	254,192,400
31	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit		202,672,259		268,122,900	3	253,895,000	3	278,671,000	3	278,671,000	3	278,671,000
32	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan		105,465,012		254,028,400	12	200,000,000	12	299,902,050	12	299,902,050	12	299,902,050
33	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan		56,426,910		109,913,435	2	100,000,000	2	114,767,235	2	114,767,235	2	114,767,235
34	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak		28,030,000		3,400,000	20	8,200,000	20	8,200,000	20	8,200,000	20	8,200,000
35	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen		619,675,334		317,361,800	740,000	317,971,000	740.000	325,921,000	740.000	325,921,000	740.000	325,921,000
36	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan		104,196,856	12	215,650,400	12	125,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000
37	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen		18,850,000	600	18,751,450	600	25,000,000	600	25,000,000	600	25,000,000	600	25,000,000
38	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen		398,103,807	600	238,743,000	600	242,000,000	600	242,000,000	600	242,000,000	600	242,000,000
39	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen		158,335,212	200	86,660,700	200	117,305,750	200	127,434,700	200	127,434,700	200	127,434,700
40	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen		106,592,895	12	38,532,000	12	45,000,000	12	45,000,000	12	45,000,000	12	45,000,000
41	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan		14,992,000	4	104,812,500	4	100,000,000	4	158,750,000	4	158,750,000	4	158,750,000
42	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan							4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id

	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		**Persentase Penyampaian Raperda APBD sesuai ketentuan**		**100**		**100**	**463,814**	**100**	**494,215,873,400**	**100**	**383,714,308,689**	**100**	**455,552,234,176**	**100**	**517,095,034,225**
			Persentase SP2D yang terbit sesuai ketentuan		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	
			Persentase penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai ketentuan		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase Dokumen Penganggaran Daerah yang tersusun sesuai ketentuan		100		100	1,077.20	100	961,500,000	100	940,000,000	100	964,700,000	100	1,058,974,000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen KUA PPAS yang disusun	Dokumen	2		2	234.7	2	211,435,000.00	2	210,000,000	2	234,700,000	2	234,700,000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen Perubahan KUA PPAS yang disusun	Dokumen	2		2	158.3	2	142,625,000	2	140,000,000	2	140,000,000	2	140,000,000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Jumlah Raperda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2		2	332.4	2	317,720,000	2	310,000,000	2	310,000,000	2	332,429,000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Jumlah Perkada tentang penjabaran perubahan APBD	Dokumen	5		5	351.8	4	289,720,000	5	280,000,000	5	280,000,000	5	351,845,000
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase Dokumen Penatausahaan dan Perbendaharaan Daerah yang tersusun sesuai ketentuan		100		100	415.9	100	245,900,000	100	329,058,000	100	338,800,000	100	430,000,000
	Sub Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	18		18	242.9	24	148,800,000	18	148,800,000	18	148,800,000	18	240,000,000
	Sub kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan Penyetoran Pehitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga	Laporan	18		18	71.8	12	34,820,000	18	71,800,000	18	75,000,000	18	75,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id

	Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban sub Kegiatan		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan Pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	Dokumen	1		1	43.5	1	28,200,000	1	43,458,000	1	50,000,000	1	50,000,000
	Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota	Orang	41		41	57.7	45	34,080,000	41	65,000,000	41	65,000,000	41	65,000,000
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sesuai ketentuan		100		100	269.6	100	235.970.000,00	100	305,750,000	100	305,750,000	100	305,750,000
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		0		0	0	0		0		0		0	
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		Jumlah laporan pertanngungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, Triwulanan dan semesteran	Laporan	18		18	5.7	18	5,225,000.00	18	5,750,000	18	5,750,000	18	5,750,000
	Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Daerah yang terkonsolidasi	Laporan	1		1	61.2	1	46.550.000,00	1	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Jumlah Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	2		2	202.7	2	184.195.000,00	2	225,000,000	2	225,000,000	2	225,000,000
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase realisasi anggaran kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolan keuangan daerah		95		95	461,672	95	492,502,553,400	95	381,809,500,689	95	453,612,984,176	95	514,970,310,225
	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah			Laporan					1	11,600,000,000						
	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	12		12	427,496	12	444,393,212,900	12	350,000,000,000	12	419,435,608,976	12	470,792,935,025

https://jdih.pemalangkab.go.id

	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	12		12	7,050	12	9,663,000,000	12	7,049,534,700	12	7,049,534,700	12	7,049,534,700
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten ke desa	Laporan	12		12	27,128	12	26,846,340,500	12	24,759,965,989	12	27,127,840,500	12	37,127,840,500
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Persentase pengelolaan data keuangan daerah yang dikelola berbasis sistem informasi		100		100	378	100	269,950,000	100	330,000,000	100	330,000,000	100	330,000,000
	Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bisdang Keuangan Daerah	Dokumen	1		1	344.8	1	247,050,000	1	295,000,000	1	295,000,000	1	295,000,000
	Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan sistem informasi pemerintah daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten	Orang	41		41	33.2	45	22,900,000	41	35,000,000	41	35,000,000	41	35,000,000
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		**Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah**		**99.13**		**99.15**	**585.5**	**100**	**367,730,000**	**100**	**404,599,800**	**100**	**404,599,800**	**100**	**404,599,800**
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah		**Persentase Tanah Milik Pemda yang bersertfikat**		**45.53**		**60**	585.5	**60**	367,730,000	60	404,599,800	60	404,599,800	60	404,599,800
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD		Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2			5.2	2	5,000,000	2	7,000,000	2	7,000,000	2	7,000,000
	Sub Kegiatan Pengamanan BMD		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan BMD	Laporan	3			358	4	224,360,000	3	259,000,000	3	259,000,000	3	259,000,000
	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahbukuan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	Dokumen	3		3	203.8	3	121,620,000	3	121,620,000	3	121,620,000	3	121,620,000
	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan BMD		Jumlah Laporan BMD yang disusun	Laporan	1		1	18.4	1	16,750,000	1	16,979,800	1	16,979,800	1	16,979,800

https://jdih.pemalangkab.go.id

1.2. Dukungan Program Prioritas Daerah

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada BPKPAD Kabupaten Pemalang mempedomani RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 terdapat program prioritas daerah dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2025-2030 (program unggulan).

Program pada BPKPAD Kabupaten Pemalang yang mendukung program prioritas daerah adalah :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sedangkan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030 (program unggulan) yang didukung oleh BPKPAD adalah :

1. *Satu Ambulance Satu Desa (Awal pelaksanaan dilakukan oleh BPKAD, selanjutnya dilaksanakan oleh Dinpermasdes)*

   Program unggulan satu ambulance satu desa merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam rangka melaksanakan visi Bersih dan handal serta misi ke-7 (Digitalisasi) yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memilikki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar. Dalam upaya mewujudkan misi tersebut maka perlu ditingkatkan pelayanan kesehatan yang dapat merespon cepat dan membantu masyarakat desa yang membutuhkan pertolongan transportasi menuju ke pusat layanan kesehatan tingkat 1. Distribusi ambulance ke desa mempertimbangkan ketersediaan mobil siaga sebagai aset desa. Menimbang kapasitas anggaran Pemerintah Kabupaten Pemalang maka distribusi ambulance mengecualikan bagi desa yang telah meilikki mobil siaga. Jumlah desa di Kabupaten Pemalang sebanyak 212 desa. Sedangkan desa yang telah memiliki mobil siaga sebanyak 50 desa. Sehingga dibutuhkan pengadaan ambulance sebanyak 162 (212-50) unit. Pengadaan ambulance dilaksanakan secara bertahap tiap tahun selama kurun waktu 5 tahun. Pada tahap awal telah diserah terimakan 16 unit ambulance kepada 16 desa di Kabupaten Pemalang pada tanggal 23 Mei 2025. Selanjutnya pada perubahan APBD Tahun 2025, telah dialokasikan pengadaan ambulance sebanyak 5 unit. *Dalam rangka mendekatkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah maka pengadaan ambulance untuk desa digeser ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinpermasdes) mulai perubahan APBD Tahun 2025.* Adapun pemetaan rencana pengadaan ambulance untuk 5 tahun ke depan sebagai berikut :

Tahun	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Jumlah
Jumlah Pengadaan Ambulance	21 unit	28 unit	28 unit	28 unit	28 unit	29 unit	162 unit

https://jdih.pemalangkab.go.id

2. *Santunan Kematian*

Santunan kematian adalah program unggulan Bupati Pemalang untuk mendukung Visi Mulya dan misi ke 5 (Silaturahmi) yaitu meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera. Santuan Kematian diberikan kepada masyarakat miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia. Santunan kematian merupakan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sehingga pembebanan santunan kematian adalah pada sub kegiatan pengelolaan dana darurat dan mendesak dengan rekening belanja tidak terduga. Berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah serta menimbang pembebanan belanja atas santunan kematian tersebut maka perangkat daerah pengampu santunan kematian adalah Dinas Sosial KBPPA dan BPKPAD. Dinas Sosial KBPPA selaku perangkat daerah yang melakukan verifikasi data calon penerima santunan kematian dan memberikan rekomendasi kepada BPKPAD untuk mencairkan dana santunan kematian. Berdasarkan rekomendasi dari Dinas Sosial KBPPA, BPKPAD memproses pencairan dana santunan kematian dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Program unggulan Bupati Pemalang yang didukung oleh BPKPAD Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Satu Ambulance Satu Desa (Awal pelaksanaan oleh BPKAD, selanjutnya beralih ke Dinpermasdes)	Meningkatnya pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan	➢ Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota ➢ Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ➢ Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Tipe Ambulance untuk desa adalah ambulance transporter yang artinya hanya bersifat pertolongan pertama.
2	Santunan Kematian	Meningkatnya kualitas perlindungan dan pemberian jaminan sosial	➢ Program Pengelolaan Keuangan Daerah ➢ Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah ➢ Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Santunan Kematian diberikan kepada masyarakat tidak mampu yang memenuhi syarat/ketentuan yang berlaku dan lolos verifikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial KBPPA sebagai perangkat daerah pengampu.

https://jdih.pemalangkab.go.id

1.3. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dokumen Renstra BPKPAD tidak lepas dari penentuan indikator kinerja utama (IKU) dan targetnya. Penentuan Indikator Kinerja Utama berpedoman pada Pohon Kinerja, *cascading*, *corebisnis* serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. IKU BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 terdiri dari 1 (satu) indikator tujuan dan 5 (lima) indikator sasaran. Indikator tujuan BPKPAD adalah :

1. Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Adapun indikator sasaran BPKPAD adalah :

1. Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPA)
2. Persentase Mandatory Spending yang terpenuhi sesuai ketentuan
3. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
5. Nilai SAKIP

Penjelasan masing-masing IKU tersebut sebagai berikut :

1. *Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Daerah (IPKD)*

   Pengukuran IPKD merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengukuran IPKD bertujuan untuk menilai kualitas kinerja tata Kelola keuangan daerah. Berdasarkan hasil pengukuran IPKD Pemda Kabupaten/Kota dan Provinsi tersebut maka dapat ditentukan Pemerintah Daerah yang layak diberikan penghargaan atas kualitas tata Kelola keuangannya yang baik dan sesuai ketentuan serta dapat ditentukan juga Pemerintah daerah yang perlu mendapat pembinaan atas tata Kelola keuangan daerahnya. Pengukuran IPKD Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Tim Penilai masing-masing provinsi. IPKD Kabupaten Pemalang dinilai oleh Tim Penilai IPKD dari provinsi Jawa Tengah dimana BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah sebagai coordinator.

   IPKD diukur berdasarkan 6 Dimensi yaitu :

   1. *Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;*

      Dimensi ini mengukur kesesuaian nama program dan nominal program yang tercantum pada dokumen RPJMD, RKPD, KUA PPAS dan APBD, yang bertujuan untuk menilai sejauh mana konsistensi Pemda dalam perencanaan dan penganggaran.

   2. *Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD;*

      Pengukuran pengalokasian anggaran belanja dalam APBD diukur dari alokasi anggaran Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah seperti alokasi anggaran untuk urusan Pendidikan dan urusan Kesehatan serta pemenuhan mandatory spending yang terkait belanja pegawai dan belanja infrastruktur pelayanan publik. Pengukuran ini bertujuan menilai sejauh mana

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pemda mematuhi amanat regulasi terkait mandatory spending dan SPM dalam penyusunan APBD.

3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah;

Pada dimensi ini diukur Tingkat transparansi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang ditentukan dengan seberapa banyak dokumen yang wajib diunggah pada website Pemerintah Kabupaten Pemalang telah dilaksanakan tepat waktu. Terdapat 29 Dokumen yang wajib diunggah ke website Pemkab Pemalang, antara lain : Hasil Opini BPK berturut turut untuk 3 tahun ke belakang, LKPD beserta LRA, LAK, LO, Neraca dan CALK, RPJMD, Raperda APBD dan Perubahannya, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Dokumen RKA/DPA dan perubahannya, Perbup tentang Kebijakan Akuntansi, LKjIP, Laporan Keuangan BUMD. Pengukuran pada dimensi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterbukaan informasi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan serta menilai kemudahan akses informasi pengelolaan keuangan oleh masyarakat.

4. Penyerapan anggaran;

Penyerapan anggaran diukur dari realisasi anggaran per jenis belanja pada APBD yaitu belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Pengukuran pada dimensi ini bertujuan menilai tingkat pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah serta kematangan perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

5. Kondisi keuangan daerah;

Kondisi keuangan daerah diukur berdasarkan 6 komponen yaitu :

1) Kemandirian Keuangan

Kemandirian keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendalinya atau pengaruhnya, baik dari sumber-sumber dalam negeri maupun luar negeri.

2) Fleksibilitas Keuangan

Fleksibilitas keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas hutang (*debt capacity*).

3) Solvabilitas Operasional

Solvabilitas operasional merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional pemerintah selama periode anggaran.

4) Solvabilitas Jangka Pendek

Solvabilitas jangka pendek menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan dua belas bulan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

5) Solvabilitas Jangka Panjang

Solvabilitas jangka Panjang merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka Panjang.

6) Solvabilitas Layanan

Solvabilitas layanan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan public yang dibutuhkan dan diinginkan oleh Masyarakat.

6. Opini BPK atas LKPD.

Pemberian opini atas LKPD dilakukan oleh BPK sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Opini BPK diberikan atas LKPD yang harus sesuai dengan standar akuntansi, kecukupan bukti, sistem pengendalian internal dan ketaatan terhadap regulasi. Opini BPK atas LKPD yang diukur pada dimensi ini adalah hasil opini BPK untuk 3 tahun ke belakang secara berturut turut.

2. Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPA)

Dasar regulasi penghitungan IPA berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, serta Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023. IPA digunakan sebagai instrumen evaluasi kualitas pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan sebagai parameter penilaian kinerja dalam reformasi birokrasi. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Untuk dapat mengukur dan mengevaluasi kualitas pengelolaan aset maka diperlukan suatu instrumen evaluasi yang dapat menggambarkan keseluruhan tahapan/siklus dalam pengelolaan aset tersebut. Dalam kaitannya dengan penggunaan Barang Milik Negara/Daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, tentunya pengelolaan aset yang baik akan berdampak pada tata kelola pemerintahan yang baik pula.

Karena Penghitungan IPA atas pengelolaan BMD belum memiliki pedoman teknis pengukurannya maka penghitungan IPA di Kabupaten Pemalang merujuk pada penghitungan BMN yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 dengan menyesuaikan kondisi existing pengelolaan aset daerah di Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sehingga IPA ditetapkan dalam bentuk indeks berdasarkan empat sasaran penilaian yaitu:

1. Pengelolaan BMD yang akuntabel dan produktif;
   Pengelolaan BMD yang akuntabel dan produktif diukur dengan 2 parameter yaitu :
   a. Persentase tindak lanjut atas temuan BPK RI pada LHP terkait BMD
   b. Persentase realisasi pendapatan dari pemanfaatan dan penjualan BMD
2. Kepatuhan pengelolaan BMD terhadap regulasi yang berlaku;
   Kepatuhan pengelolaan BMD terhadap regulasi yang berlaku diukur dengan 2 parameter yaitu :
   a. Persentase penyampaian laporan BMD dan usulan RKBMD tepat waktu dan sesuai ketentuan
   b. Persentase asuransi BMD
3. Pengawasan dan pengendalian BMD yang efektif;
   Pengawasan dan pengendalian BMD yang efektif diukur dengan 2 parameter yaitu :
   a. Persentase tindak lanjut pemanfaatan, pengamanan dan penghapusan BMD
   b. Persentase tindak lanjut BMD yang rusak berat
4. Administrasi BMD yang andal.
   Sasaran penilaian administrasi BMD yang andal diukur dengan 2 parameter yaitu :
   a. Persentase BMD yang memiliki dokumen kepemilikan (Tanah milik pemda yang telah bersertifikat)
   b. Persentase Penggunaan BMD sesuai ketentuan (BMD telah ditetapkan status penggunaanya)

3. Persentase Mandatory Spending yang terpenuhi sesuai ketentuan

Mandatory spending merupakan amanat regulasi terhadap alokasi belanja daerah yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD. Berdasarkan Undang-undang nomor 1 Tahun 2025 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Terdapat beberapa mandatory spending yang wajib dipenuhi pada APBD yaitu :

No	Mandatory Spending	Definisi Operasional
1	Belanja Pegawai maksimal 30%	➢ Belanja Pegawai diluar tunjangan guru yang bersumber dari dana transfer dibanding total belanja pada penetapan atau perubahan APBD tahun berkenaan. ➢ Yang dimaksud tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD adalah Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Mandatory Spending	Definisi Operasional
		Profesi Guru dan Tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya
2	Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik minimal 40%	➢ Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dibanding Total Belanja pada APBD diluar belanja transfer kepada desa ➢ Yang dimaksud belanja infrastruktur pelayanan publik adalah belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah
3	Belanja Pendidikan minimal 20%	➢ Belanja Pendidikan dibanding total belanja pada penetapan atau perubahan APBD ➢ Belanja Pendidikan adalah belanja yang dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keluaran untuk menunjang fungsi pendidikan yang dianggarkan pada APBD tahun angagran berkenaan.
4	Alokasi Dana Desa minimal 10%	➢ Jumlah Alokasi Dana Desa dibanding dengan total Belanja APBBD dikalikan 100% ➢ yang dimaksud alokasi dana desa adalah seluruh belanja yang dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa baik belanja bantuan keuangan yang bersifat umum maupun khusus (pendampingan TMMD, Musrenbang, Pokir, BKKD)
5	Belanja Kesehatan yang didanai dari pajak rokok minimal 37,5%	Belanja Wajib yang digunakan untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat
6	Belanja wajib diluar belanja kesehatan yang didanai dari pajak	Belanja Wajib yang digunakan untuk mendanai penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Mandatory Spending	Definisi Operasional
	rokok minimal 12,5%	mengenai pajak rokok
7	Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan PKB dan opsen PKB minimal 10%	Belanja Wajib yang digunakan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum
8	Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga Listrik minimal 10%	Belanja Wajib yang digunakan untuk mendanai penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur PJU serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk PJU
9	Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak Air Tanah (PAT) minimal 10%	Belanja Wajib yang digunakan unatuk mendanai pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah yg meliputi : a. penanaman pohon; b. pembuatan lubang atau sumur serapan; c. pelestarian hutan atau pepohonan; d. pengelolaan limbah

4. Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah

Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, sering juga disebut Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, adalah perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rasio ini mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah, di mana semakin tinggi rasio PAD, semakin besar kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri, tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks kepuasan Masyarakat merupakan indeks yang dihitung dari hasil survey kepuasan Masyarakat (SKM). IKM BPKPAD merupakan rata-rata dari hasil penggabungan IKM BPKAD dengan IKM BAPENDA. SKM dilakukan untuk mengetahui seberapa baik layanan BPKPAD dan masukan apa yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan pelayanan BPKPAD. Sasaran SKM adalah perangkat daerah dan Masyarakat yang menerima layanan BPKPAD.

https://jdih.pemalangkab.go.id

6. Nilai SAKIP BPKPAD

Tidak berbeda dengan IKM, Nilai SAKIP BPKPAD merupakan hasil rata-rata penggabungan nilai SAKIP BPKAD dengan nilai SAKIP BAPENDA. Karena BPKPAD merupakan gabungan antara BPKAD dan BAPENDA. Nilai SAKIP kedua perangkat daerah tersebut merupakan hasil evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat setiap tahunnya.

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKPAD tahun 2025 – 2029 sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	BASELINE TAHUN		TARGET KINERJA SETIAP TAHUN						Kondisi Akhir Periode Renstra	KET
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)		(10)
1	Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	65,7108	70,1277	75	75	75	75	75	75	75	Capaian ditargetkan sama dari tahun 2025 s/d 2030 agar terlihat jelas progress persentase capaian dari tahun ke tahun
2	Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPA)	Indeks	NA	2,6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
3	Persentase Mandatory Spending yang terpenuhi sesuai ketentuan	%	NA	66,67	70	70	70	70	70	70	70	
4	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	14.14	14,166	18,909	20	20	20	20	20	20	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	82,38	84,02	88	88	88	88	88	88	88	
6	Nilai SAKIP	Nilai	63,15	64,36	72	72	72	72	72	72	72	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Selain IKU, BPKPAD juga mengampu Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPKPAD merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja dan pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. IKK BPKPAD sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE TAHUN		TARGET KINERJA TAHUN						Kondisi Akhir Periode Renstra	KET
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)	(11)
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan Tenaga Kesehatan	%	10,14	24,94	24,50	24,25	24,00	23,75	23,50	23,25	23,25	Jumlah Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan dibanding dengan total belanja APBD
2	Rasio Pendapatan Asli Daerah	%	14,14	14,12	18,91	20	20	20	20	20	20,00	Realisasi PAD dibanding dengan total realisasi pendapatan daerah
3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Ekspenditure)	%	70,14	71,44	71,25	71,00	70,75	70,50	70,25	70,00	70,00	Total Realisasi Belanja dikurangi realisasi (Belanja modal+Hibah+Bansos+Bankeudes+BTT+Bagi Hasil) dibanding dengan total realisasi belanja
4	Budget Execution (Deviasi realisasi belanja terhadap total belanja dalam APBD)	%	-3,57	-6,86	-6,00	-5,50	-5,00	-4,50	-4,00	-3,50	-3,50	Perbandingan realisasi belanja dengan anggaran belanja pada perubahan APBD, dikurangi 1

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE TAHUN		TARGET KINERJA TAHUN						Kondisi Akhir Periode Renstra	KET
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)	(11)
5	Revenue Mobilization (Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD)	%	-9,28	-9,72	-9,50	-9,25	-9,00	-8,75	-8,50	-8,25	-8,25	Perbandingan realisasi PAD dengan anggaran PAD pada perubahan APBD dikurangi 1
6	Cash Management (Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD tahun sebelumnya)	%	7,66	11	10,50	10,00	9,50	9,00	8,50	8,00	8,00	Realisasi SILPA tahun pelaporan dibanding Anggaran belanja pada penetapan APBD tahun sebelumnya
7	Persentase penurunan SILPA	%	3,33	80,03	70,00	60,00	50,00	40,00	30,00	20,00	20,00	Realisasi SILPA tahun pelaporan dikurangi realisasi SILPA tahun sebelumnya, dibanding dengan realisasi SILPA tahun sebelumnya
8	Pertambahan nilai aset tetap	%	0,21	4,95	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	7,50	Nilai aset tetap pada neraca tahun pelaporan dikurangi nilai aset tetap tahun sebelumnya, dibanding dengan nilai aset tetap tahun sebelumnya
9	Akses Publik terhadap Informasi Keuangan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah dokumen ang telah dipublikasikan pada website pemda dibanding dengan jumlah dokumen yang wajib diupload pada SILPPD (Ada 12 dokuemn yaitu RKA SKPD, RKA PPKD, Raperda APBD, Raperda Perubahan APBD, Perda APBD, Perda Perubahan APBD, DPA SKPD, DPA

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE TAHUN		TARGET KINERJA TAHUN						Kondisi Akhir Periode Renstra	KET
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)	(11)
												PPKD, LRA SKPD, LRA PPKD, LKPD Unaudited dan LKPD Audited)
10	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	92,84	86,47	86,50	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00	Realisasi belanja unit pelayanan yg dapat diakses di website pemda dibanding dengan anggara belanja unit pelayanan yang dapat diakses pada website pemda
11	Hasil Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Hasil Opini BPK RI atas pemeriksaan LKPD tahun sebelumnya
12	Manajemen Aset	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Semua Dokumen manajemen aset telah disusun yaitu : 1. Daftar Aset Tetap 2. Kertas Kerja untuk Menyusun daftar aset tetap 3. Inventarisasi aset tahunan 4. Nilai Aset tetap telah dicantumkan pada laporan keuangan (Neraca)

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan program kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang telah ditentukan tiap tahunnya. Pelaksanaan kegiatan dalam upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam renstra BPKPAD Tahun 2025-2029 perlu dilakukan pengendalian resiko strategis dengan tujuan meminimalkan resiko, memperkecil hambatan, mengatasi kendala dan masalah yang mungkin terjadi serta menghindari kemungkinan terjadinya fraud. Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja pada Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang 2025-2029 merupakan penjabaran atas visi, misi, tujuan dan sasaran daerah yang didukung dengan indikator daerah sesuai dengan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Dokumen renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 serta menjadi pedoman penyusunan rencana kerja (renja) tahun 2030 sebagai tahun transisi.

Kaidah pelaksanaan yang perlu diatur dalam Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dibentuk untuk mendukung peningkatan pelayanan dan mengoptimalkan capaian kinerja yang telah ditargetkan pada Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029;
2. Penyusunan Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dijabarkan pelaksanaan tiap tahunnya dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 serta Renja BPKPAD Tahun 2030 sebagai tahun transisi;
3. Pencapaian target kinerja perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala agar dapat dicapai realisasi kinerja yang optimal dengan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan agar berjalan efektif dan efisien serta selaras dengan outcome dan output yang ingin dicapai.
4. Renstra BPKPAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian atas perubahan kebijakan Nasional, Regional ataupun Kebijakan lokal yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dokumen renstra ini akan dilakukan evaluasi apabila terjadi perubahan SOTK BPKPAD Kabupaten Pemalang, perubahan IKU serta penyesuaian terhadap regulasi yang berlaku.

Selanjutnya kami berharap, dokumen renstra ini dapat mendukung peningkatan kinerja pelayanan BPKPAD Kabupaten Pemalang secara berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang berkualitas unggul.

Pemalang, 20 September 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

ROSI KARTIKA DEWI, SE, Ak, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681118 199603 2 006

https://jdih.pemalangkab.go.id

V. RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasar pasal 219 ayat (1) huruf c UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, sehingga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dibentuk dalam rangka membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. Hal ini selaras dengan pasal xx ayat (xx) Peraturan Bupati Pemalang Nomor xx Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Pemalang, bahwa BKPSDM merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah. Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, BKPSDM Kabupaten Pemalang secara proaktif berperan dalam meningkatkan kualitas manajemen dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mewujudkan birokrasi *capable* sehingga mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat. Agar tujuan tersebut dapat tercapai harus didukung oleh perencanaan yang baik sehingga perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

BKPSDM Kabupaten Pemalang sebagai salah satu PD harus menyusun Renstra. Penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra K/L (Badan Kepegawaian Negara/BKN, Kementerian PAN RB, dan Kementerian Dalam Negeri) dan Renstra Provinsi Jawa Tengah (Badan Kepegawaian Daerah/BKD dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah/BPSDMD).

Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Renstra menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di BKPSDM Kabupaten Pemalang selama kurun waktu tahun 2025-2029 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan keterkaitan antara tujuan dan sasaran Daerah dengan tujuan dan sasaran BKPSDM Kabupaten Pemalang, dimana program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan BKPSDM Kabupaten Pemalang harus mendukung tujuan dan sasaran Daerah sehingga visi dan misi Daerah dapat tercapai.

Mendasari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, tahapan penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, meliputi :

1. Persiapan Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, meliputi :
   a. Pembentukan tim penyusun Renstra PD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
   b. Pelaksanaan orientasi penyusunan Renstra PD;
   c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra PD;
   d. Analisis data evaluasi hasil pembangunan 5 (lima) tahun terakhir;
   e. Inventaris data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lainnya; dan
   f. Hal-hal yang diperlukan dalam proses penyusunan Renstra PD.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD Tahun 2025-2029
   a. Rumusan rancangan awal Renstra PD Tahun 2025-2029, mencakup :
      1) Gambaran pelayanan PD;
      2) Perumusan masalah dan isu strategis;
      3) Perumusan tujuan dan sasaran;
      4) Perumusan strategi dan arah kebijakan; dan
      5) Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan PD.
   b. Hasil perumusan rancangan awal Renstra PD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :
      1) Pendahuluan;
      2) Gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis PD;
      3) Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
      4) Program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
      5) Penutup.
3. Penyusunan Rancangan Renstra PD
   Penyusunan rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renstra PD Tahun 2025-2029 menjadi rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra PD.

https://jdih.pemalangkab.go.id

4. Forum PD/Lintas PD
   a. Rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 dibahas dalam Forum PD/Lintas PD;
   b. Forum PD/Lintas PD dikoordinasikan oleh Bappelitbangda Kabupaten Pemalang dengan pendekatan tematik yang melibatkan PD terkait;
   c. Pendekatan tematik dimaksud ditentukan oleh Bappelitbangda Kabupaten Pemalang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah, dengan mempertimbangkan ketercapaian tujuan dan sasaran RPJMD;
   d. Tematik pembangunan sebaiknya tidak berbentuk tema pembangunan yang terlalu makro seperti pengentasan kemiskinan;
   e. Forum PD/Lintas PD dilaksanakan untuk menyepakati keluaran (*output*) utama Renstra PD, termasuk keluaran (*output*) untuk melaksanakan program kepala daerah, dan keterhubungan keluaran (*output*) antar Renstra PD dalam mencapai kinerja hasil (*outcome*) tematik pembangunan;
   f. Forum PD/Lintas PD Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD, seperti : pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, asosiasi usaha, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan/kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, dan pemangku kepentingan terkait;
   g. Hasil Forum PD/Lintas PD Tahun 2025-2029 dirumuskan dalam Berita Acara kesepakatan Forum PD/Lintas PD dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum PD/Lintas PD.
5. Verifikasi Rancangan Renstra PD
   a. PD melakukan penyempurnaan rancangan awal Renstra PD menjadi rancangan Renstra PD berdasarkan berita acara kesepakatan Forum PD/Lintas PD;
   b. Setelah pelaksanaan Forum PD/Lintas PD Kepala BKPSDM Kabupaten Pemalang menyampaikan rancangan Renstra PD kepada Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pemalang untuk diverifikasi;
   c. Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra PD telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodasi hasil Berita Acara Forum PD/Lintas PD;
   d. Bappelitbangda Kabupaten Pemalang melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra PD sekurang-kurangnya menyangkut 5 (lima) hal, yaitu:
      1) Memastikan *cascading* yang memadai, mulai dari *outcome* tujuan sampai *output* sub kegiatan (efektifitas *output* dalam menunjang *outcome*);
      2) Memastikan kesesuaian program RPJMD dengan program Renstra PD, termasuk indikator dan targetnya;
      3) Memastikan kesesuaian program prioritas RPJMD dengan program Renstra PD;
      4) Memastikan program Kepala Daerah telah masuk dalam program prioritas daerah; dan
      5) Memastikan rancangan Renstra PD telah mengakomodasi hasil Berita Acara Forum PD/Lintas PD.

https://jdih.pemalangkab.go.id

e. PD menyempurnakan rancangan Renstra PD berdasarkan hasil verifikasi Bappelitbangda Kabupaten Pemalang; dan
f. Rancangan Renstra PD yang telah disempurnakan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

6. Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029
   a. Perumusan rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 menjadi rancangan akhir Renstra PD berdasarkan Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029; dan
   b. Perumusan rancangan akhir Renstra PD dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program prioritas yang ditetapkan dalam Perda RPJMD.
7. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029
   a. Rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 direviu oleh APIP;
   b. Mekanisme dan tata cara reviu APIP Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. Hasil reviu APIP terhadap rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 disampaikan kepada PD; dan
   d. PD menyempurnakan rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 berdasarkan hasil reviu APIP.
8. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD
   a. PD menyampaikan rancangan akhir Renstra PD yang telah disempurnakan berdasarkan hasil reviu APIP kepada Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pemalang untuk diverifikasi sebelum ditetapkan;
   b. Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, program, kegiatan, dan sub kegiatan pada rancangan akhir Renstra PD sudah selaras dengan Perda RPJMD Tahun 2025-2029;
   c. Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Bappelitbangda Kabupaten Pemalang menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 kepada PD; dan
   d. Berdasarkan saran dan rekomendasi dari Bappelitbangda Kabupaten Pemalang, Kepala BKPSDM Kabupaten Pemalang menyempurnakan rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029.
9. Penetapan Renstra PD Tahun 2025-2029
   a. Rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Pemalang kepada Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pemalang untuk dilakukan proses penetapan Renstra PD;
   b. Bappelitbangda Kabupaten Pemalang menyampaikan rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan
   c. Penetapan Peraturan Bupati Renstra PD Tahun 2025-2029 paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tahapan penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disajikan dalam bagan berikut :

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang
Tahun 2025-2029

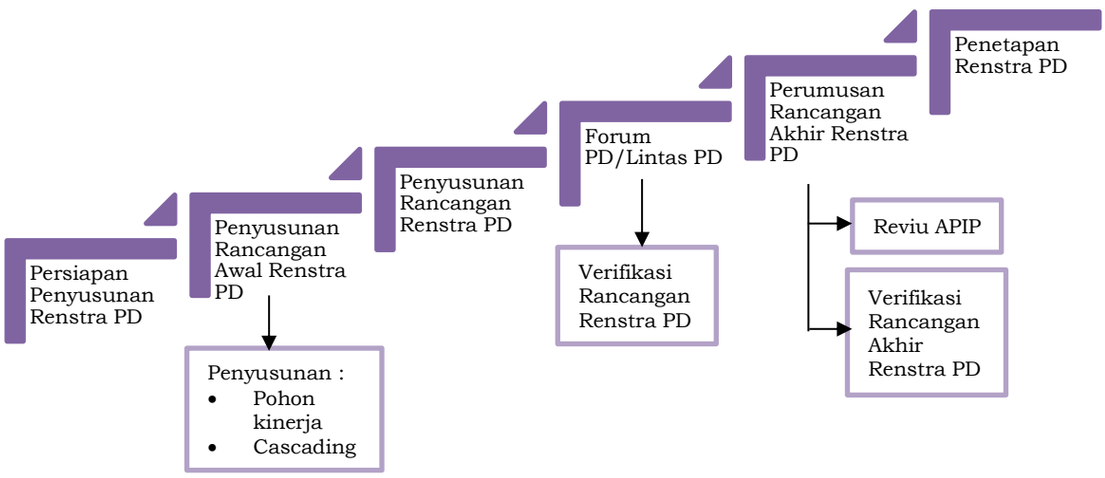

Sumber : *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025*

Dokumen Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang dan memperhatikan Renstra K/L, Renstra Provinsi Jawa Tengah dan dokumen manajemen risiko. Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut :

Gambar 1.2
Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

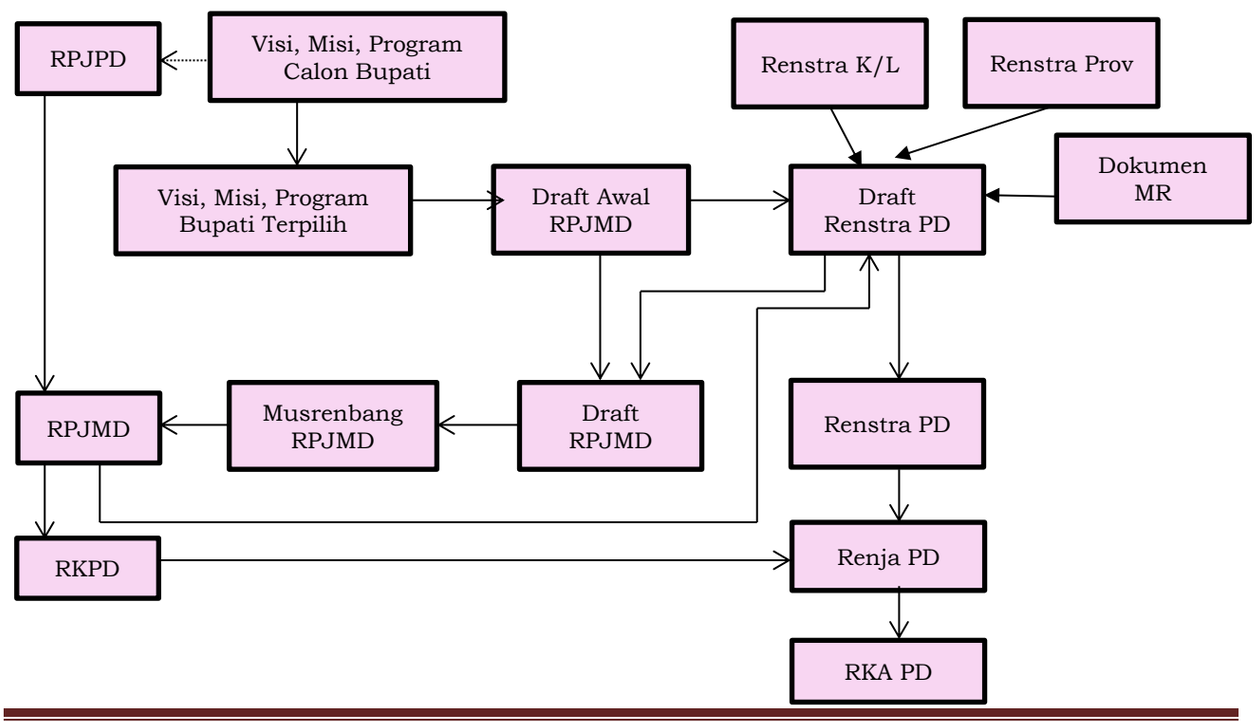

https://jdih.pemalangkab.go.id

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

https://jdih.pemalangkab.go.id

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 6264);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor xx);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor xx Tahun xx tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor xx, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor xx);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor xx Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor xx, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor xx);

https://jdih.pemalangkab.go.id

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor xx Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor xx, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor xx)
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor xxx);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja;
32. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor xxx/Kep/2025 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025-2029;
33. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor xx Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2025-2029;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor xx Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 2029;

https://jdih.pemalangkab.go.id

37. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor xx Tahun 2025 tentang Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029;
38. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
39. Peraturan Bupati Pemalang Nomor xx Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Pemalang;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai acuan dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan penyelenggaraan unsur penunjang bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2025.

Adapun tujuan penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2029;
2. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang;
3. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan di BKPSDM Kabupaten Pemalang baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

   Memuat latar belakang (pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra PD, dan Renja PD), landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
2. Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis BKPSDM Kabupaten Pemalang

   Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, capaian program prioritas perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode 2021-2026, dan hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang ini.

https://jdih.pemalangkab.go.id

3. Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
   Memuat uraian tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan serta strategi yang merupakan rangkaian tahapan atau langkah langkah yang menggambarkan sebagaimana tujuan dan sasaran PD akan dicapai, serta memuat arah kebijakan yang dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit dan operasional.
4. BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
   Memuat rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya serta penjelasan sub kegiatan yang mendukung program-program prioritas daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Juga memuat indikator kinerja perangkat daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, serta indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan BKD Kabupaten Pemalang.
5. BAB V Penutup
   Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BKPSDM KABUPATEN PEMALANG

2.1. Gambaran Pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang

2.1.1.Tugas, Fungsi dan Struktur BKPSDM Kabupaten Pemalang

BKPSDM Kabupaten Pemalang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor xx Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor xx Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pemalang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BKPSDM Kabupaten Pemalang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Pemalang

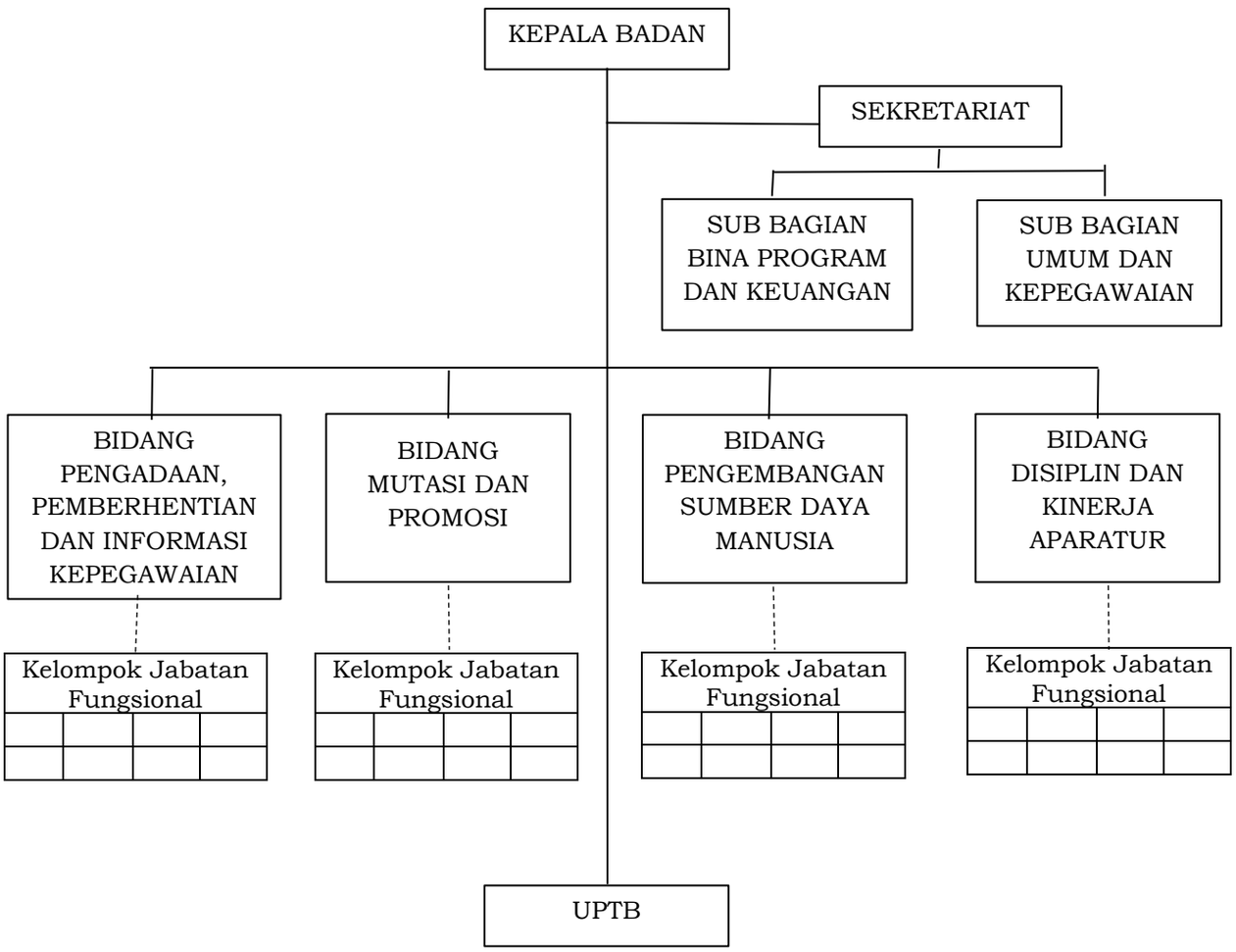

Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor xx Tahun 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

BKPSDM merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. BKPSDM mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Kegiatan yang dilakukan berupa : pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN, mutasi dan promosi ASN, pengembangan kompetensi ASN, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur, pengembangan kompetensi teknis, serta sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. Untuk melaksanakan tugas pokok, BKPSDM Kabupaten Pemalang menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN, mutasi dan promosi ASN, pengembangan kompetensi ASN, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur, pengembangan kompetensi teknis, serta sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN, mutasi dan promosi ASN, pengembangan kompetensi ASN, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur, pengembangan kompetensi teknis, serta sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN, mutasi dan promosi ASN, pengembangan kompetensi ASN, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur, pengembangan kompetensi teknis, serta sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional;
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Berikut uraian tugas jabatan struktural BKPSDM Kabupaten Pemalang berdasar Peraturan Bupati Pemalang Nomor xx Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Pemalang :

A. Kepala BKPSDM

Kepala BKPSDM mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. menetapkan Renstra dan Renja penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dengan mengacu pada RKPD dan RPJMD;
2. merumuskan usulan RKA dan DPA dengan mengacu pada Renstra dan Renja;
3. merumuskan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan serta pendidikan dan pelatihan;
4. mengarahkan penyelenggaraan program kegiatan dan sub kegiatan bidang kepegawaian dan serta pendidikan dan pelatihan;
5. mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan bidang kepegawaian dan serta pendidikan dan pelatihan;
6. mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bidang kepegawaian dan serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan unsur SPIP;

https://jdih.pemalangkab.go.id

7. mengarahkan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan, DPA bidang kepegawaian dan serta pendidikan dan pelatihan;
8. mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang kepegawaian dan serta pendidikan dan pelatihan;
9. merumuskan inovasi daerah bidang kepegawaian dan serta pendidikan dan pelatihan;
10. merumuskan laporan di bidang kepegawaian dan serta pendidikan dan pelatihan;
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Sekretaris BKPSDM

Tugas dan Fungsi :

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKPSDM.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan BKPSDM;
2. penyiapan koordinasi dan kegiatan di lingkungan BKPSDM;
3. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan BKPSDM;
4. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan BKPSDM;
5. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
6. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BKPSDM;
7. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan BKPSDM; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris BKPSDM mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan;
2. mengoordinasikan usulan Renstra, Renja, RKA dan DPA;
3. menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan;
4. menyelenggarakan pemberian koordinasi, dukungan meliputi pelayanan ketatausahaan, pembinaan, administrasi kepegawaian, pengelolaan kedinasan hukum, dan yang keuangan, kerumahtanggan, barang milik daerah, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dokumentasi dan pengadaan barang/jasa;
5. menyelenggarakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian;
6. mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik;
7. menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan unsur SPIP;
8. menyusun konsep inovasi kesekretariatan;
9. mengoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang- bidang;

https://jdih.pemalangkab.go.id

10. mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan kesekretariatan;
11. mengoordinasikan penyusunan laporan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian

Tugas dan Fungsi :

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian; dan
2. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian sesuai dengan dokumen perencanaan;
2. menyusun rancangan kebijakan Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;
3. merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;
4. menyelenggarakan kegiatan pengadaan ASN yang meliputi penyusunan formasi pegawai ASN, pengangkatan CPNS menjadi PNS dan sumpah janji PNS, pengelolaan perjanjian kerja PPPK serta evaluasi pengadaan ASN;
5. menyelenggarakan kegiatan pemberhentian ASN meliputi penyusunan bahan pemberhentian PNS dengan atau tanpa hak pensiun dan pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK;
6. menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi kepegawaian yang meliputi pengembangan sistem, pengolahan data, administrasi arsip fisik dan elektronik (*e-file*) serta penyusunan buku profil kepegawaian;
7. menyelenggarakan pengelolaan gaji berkala dan data tambahan penghasilan pegawai;
8. memfasilitasi dan/atau membuat kartu-kartu kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
9. memfasilitasi uji kesehatan, jaminan pensiun, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ASN;
10. memfasilitasi lembaga profesi ASN sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
11. menyusun konsep inovasi Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;
12. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;

https://jdih.pemalangkab.go.id

13. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;
14. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;
15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

D. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi

Tugas dan Fungsi :

Kepala Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang mutasi dan promosi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Mutasi dan Promosi menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang mutasi dan promosi; dan
2. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Bidang Mutasi dan Promosi sesuai dengan dokumen perencanaan;
2. menyusun rancangan kebijakan Bidang Mutasi dan Promosi;
3. merumuskan kebijakan teknis di Bidang Mutasi dan Promosi;
4. menyelenggarakan pengelolaan kegiatan mutasi yang meliputi mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, mutasi PNS antar instansi dan dalam satu instansi, mutasi kepala sekolah dan kepala puskesmas;
5. menyusun pola pengembangan karir dan kelompok rencana suksesi PNS;
6. menyelenggarakan pengelolaan kegiatan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi;
7. menyelenggarakan pengelolaan administrasi Pj Sekretaris Daerah, Plt, Plh;
8. menyelenggaraan pengelolaan kegiatan kenaikan pangkat PNS;
9. menyusun konsep inovasi Bidang Mutasi dan Promosi;
10. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Mutasi dan Promosi;
11. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Mutasi dan Promosi;
12. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Mutasi dan Promosi;
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

E. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tugas dan Fungsi :

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya manusia; dan
2. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan dokumen perencanaan;
2. menyusun rancangan kebijakan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. menyelenggarakan pengelolaan pengembangan kompetensi yang meliputi analisa kebutuhan diklat dan penyusunan kebutuhan tugas belajar sesuai dengan rencana pengembangan kompetensi;
5. merumuskan analisa kebutuhan pelatihan yang meliputi pelatihan teknis, fungsional dan kepemimpinan;
6. memfasilitasi pengiriman dan/atau penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis, orientasi, sosialisasi, workshop, seminar dan kegiatan pengembangan kompetensi lainnya;
7. menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional;
8. melaksanakan pembinaan dan pengembangan karir jabatan fungsional;
9. melaksanakan fasilitasi sertifikasi jabatan ASN;
10. menyusun konsep inovasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
11. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
12. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
13. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

F. Kepala Bidang Disiplin dan Kinerja Aparatur

Tugas dan Fungsi :

Kepala Bidang Disiplin dan Kinerja Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang disiplin dan kinerja aparatur.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Disiplin dan Kinerja Aparatur menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang disiplin dan kinerja aparatur; dan
2. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Disiplin dan Kinerja Aparatur mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Bidang Disiplin dan Kinerja Aparatur sesuai dengan dokumen perencanaan;
2. menyusun rancangan kebijakan Bidang Disiplin dan Kinerja Aparatur;
3. merumuskan kebijakan teknis di Bidang Disiplin dan Kinerja Aparatur;
4. menyelenggarakan pengelolaan kinerja ASN yang meliputi perencanaan kinerja, penyusunan informasi indikator penilaian kinerja, penilaian kinerja aparatur dan evaluasi hasil penilaian kinerja;

https://jdih.pemalangkab.go.id

5. menyelenggarakan pembinaan disiplin ASN yang meliputi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN, cuti, fasilitasi pelaporan LHKPN, pelayanan proses ijin perkawinan atau ijin perceraian;
6. menyelenggarakan pengelolaan pemberian penghargaan bagi ASN;
7. memfasilitasi pemberian tanda jasa PNS;
8. memfasilitasi perlindungan ASN yang meliputi bantuan hukum dan pelayanan kesehatan bagi ASN;
9. memfasilitasi ijin pencalonan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. menyusun konsep inovasi Bidang Disiplin dan Kinerja Aparatur;
11. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Disiplin dan Kinerja Aparatur;
12. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Disiplin dan Kinerja Aparatur;
13. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Disiplin dan Kinerja Aparatur;
14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

G. Kepala Unit Penilaian Kompetensi

Tugas dan Fungsi :

Kepala Unit Penilaian Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang penyelenggaraan penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara yang meliputi kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Unit Penilaian Kompetensi menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana teknis operasional penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara,
2. pelaksanaan kegiatan teknis operasional penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara,
3. pelaksanaan kerja sama di bidang penilaian kompetensi,
4. pelaksanaan pelayanan umpan balik hasil penilaian kompetensi,
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pascapelaksanaan penilaian,
6. pembinaan kelompok jabatan fungsional,
7. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BKD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Unit Penilaian Kompetensi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan program dan kegiatan Upenkom sesuai dengan dokumen perencanaan.
2. menyusun konsep pengelolaan Upenkom sesuai dengan rencana kerja.
3. mengelola ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan, dan rumah tangga pada Upenkom.
4. menyiapkan rencana teknis pelaksanaan penilaian kompetensi.
5. melaksanakan evaluasi kegiatan penilaian kompetensi ASN.
6. menginventarisasi dan melaksanakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan penilaian kompetensi ASN.
7. melaporkan hasil penilaian kompetensi ASN.

https://jdih.pemalangkab.go.id

8. melaksanakan kerja sama pelaksanaan penilaian kompetensi ASN dengan instansi lain.
9. melaksanakan pembinaan jabatan fungsional pada Upenkom.
10. menyusun konsep inovasi pada Upenkom.
11. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Upenkom.
12. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Upenkom.
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.2.Sumber Daya BKPSDM Kabupaten Pemalang

Sumber daya BKPSDM Kabupaten Pemalang yang meliputi sumber daya manusia/kepegawaian dan sarana prasarana sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

a. Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

BKPSDM Kabupaten Pemalang dipimpin oleh Kepala Badan yang membawahi Sekretariat, 4 (empat) bidang dan 1 UPT. Jumlah ASN BKPSDM Kabupaten Pemalang sebanyak 46 orang dan pegawai non ASN sebanyak 8 orang, secara detail akan disajikan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Pegawai BKPSDM Kabupaten Pemalang

No	Uraian	Jenis Kelamin		Golongan				Jumlah
		L	P	I	II	III	IV	
1	Kepala	1	-	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	-	-	-	-	-
3	Kabid	1	2	-	-	-	3	3
4	Kasubag/Ka UPT	-	3	-	-	2	1	3
5	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	8	3	-	-	8	3	11
6	Assesor SDM	1	2	-	-	3	-	3
7	Pranata Komputer	1	2	-	-	3	-	3
8	JFU	13	9	-	6	16	-	22
9	Non ASN	5	3	8	-	-	-	8
Jumlah		30	24	8	6	32	8	54

Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, Mei 2025

Berdasar tabel 2.1, pegawai BKPSDM Kabupaten Pemalang berjumlah 54 orang, meliputi 30 orang laki-laki dan 24 orang perempuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai BKPSDM Kabupaten Pemalang dominan laki-laki yaitu sebanyak 55,56%. Selanjutnya jumlah pegawai berdasar golongan, meliputi golongan I atau non ASN sebanyak 8 orang, golongan II sebanyak 6 orang, golongan III sebanyak 32 orang dan golongan IV sebanyak 8 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai BKPSDM Kabupaten Pemalang dominan bergolongan III yaitu sebanyak 59,26%.

Tabel 2.2
Data Pegawai Berdasar Diklat Kepemimpinan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Diklat Pim II/PKN	-	-	-
2	Diklat Pim III/PKA	1	1	-
3	Diklat Pim IV/PKP	4	1	3
4	Struktural yang belum diklat	6	2	4

Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, Mei 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

Berdasar tabel 2.2, dapat diketahui bahwa pegawai yang sudah mengikuti Diklatpim III sebanyak 1 orang, sudah mengikuti Diklatpim IV sebanyak 4 orang, dan belum mengikuti diklat kepemimpinan sebanyak 6 orang, hal ini disebabkan masih menunggu penyelenggaraan diklat dari instansi yang berwenang.

Tabel 2.3
Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pasca Sarjana (S2)	12	6	6
2	Sarjana (S1)/Diploma IV	27	11	16
3	Diploma III	1	1	-
4	SLTA	14	11	3
Jumlah		54	29	25

Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, Mei 2025

Berdasar tabel 2.3, dapat diketahui bahwa pegawai dengan tingkat pendidikan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 12 orang, Sarjana (S1)/Diploma IV sebanyak 27 orang, Diploma III sebanyak 1 orang, dan SLTA sebanyak 14 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara kualitas SDM di BKPSDM Kabupaten Pemalang sudah tercukupi, yaitu dengan dominansi berpendidikan S1/DIV sebanyak 50%.

Tabel 2.4
Data Pegawai Berdasar Jabatan

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP)	1	1	-
2	Administrator	3	1	2
3	Pengawas	3	-	3
Jumlah		7	2	5

Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, Mei 2025

Berdasar tabel 2.4, dapat diketahui bahwa pejabat JPTP sebanyak 1 orang, administrator sebanyak 3 orang, dan pengawas sebanyak 3 orang. Terdapat kekosongan di jabatan administrator sebanyak 2 formasi. Formasi jabatan pengawas lebih banyak dibandingkan formasi administrator disebabkan adanya penyederhanaan birokrasi yang mengakibatkan hilangnya jabatan pengawas di bidang.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Untuk meningkatkan kapasitas SDM yang ada, selama kurun waktu tahun 2020-2024 BKPSDM Kabupaten Pemalang telah melaksanakan kegiatan pengembangan SDM yang tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun Ke (Juta Rp)					Realisasi Tahun Ke (Juta Rp)					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Pelaksanaan Ke (%)					Uraian Permasalahan
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**																
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	69,90					69,79					99,85					-
2	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**																
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		50,00	147,22	50,21	93,60		48,76	140,84	49,91	91,25		97,53	95,67	99,41	97,49	-

Anggaran untuk pengembangan SDM di BKPSDM Kabupaten Pemalang selama tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif disebabkan anggaran yang teralokasikan juga fluktuatif menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja utama BKPSDM Kabupaten Pemalang. Selanjutnya untuk realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2020-2024 rata-rata sebesar 97,99%, yang artinya rata-rata 97,99% pegawai BKPSDM Kabupaten Pemalang setiap tahunnya telah mengikuti kegiatan pengembangan SDM.

https://jdih.pemalangkab.go.id

b. Sarana dan Prasarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh BKPSDM Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Inventaris Aset BKPSDM Kabupaten Pemalang

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Jumlah Harga (Rp)
			Baik	Sedang	Rusak	
	DAFTAR ASET TETAP	967	897	74	0	6,478,771,792
	PERALATAN DAN MESIN	789	719	74	0	6.004.988.792
1	ALAT BESAR	2	2	0	0	20.470.000
	- Portable Generating Set	2	2			20.470.000
2	KOMPUTER	287	243	49	0	2.229.512.133
	- Mainframe (komputer jaringan)	1	1	0	0	102.600.000
	- Mini komputer	1	1	0	0	8.110.000
	- Komputer jaringan lainnya	1	1	0	0	18.909.000
	- PC Unit	60	50	10	0	394.616.900
	- Laptop	15	10	5	0	181.460.100
	- Note book	46	36	10	0	513.759.620
	- Personal komputer lainnya	5	5	0	0	36.056.000
	- CPU (peralatan mainframe)	4	4	0	0	29.000.000
	- Hard disk	2	2	0	0	13.023.500
	- Scanner (peralatan mini komputer)	1	1	0	0	14.100.000
	- CPU (peralatan personel komputer)	15	15	0	0	49.326.000
	- Monitor	29	25	4	0	27.199.250
	- Printer (peralatan personal komputer)	62	52	15	0	330.733.133
	- Scanner (peralatan personel komputer)	20	15	5	0	195.563.360
	- Eksternal (portable harddisk)	4	4	0	0	14.416.100
	- Peralatan personal komputer lainnya	1	1	0	0	5.683.050
	- Server	5	5	0	0	238.475.000
	- Router	4	4	0	0	32.141.620
	- Hub	4	4	0	0	11.809.500
	- Modem	1	1	0	0	750.000
	- Peralatan jaringan lainnya	6	6	0	0	11.780.000
3	ALAT ANGKUTAN	35	30	4	0	1.967.628.094
	- Station Wagon	8	6	2	0	1.569.147.294
	- Sepeda Motor	26	24	2	0	396.780.800
	- Trolly Car/Lori	1	0	0	0	1.700.000
4	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	409	388	21	0	1.594.922.131
	- Mesin Ketik Manual Standard (14-16 cm)	5	3	2	0	4.600.000
	- Mesin Fotocopy Folio	1	1	0	0	34.900.000
	- Lemari Besi/Metal	18	10	8	0	60.550.000
	- Lemari Kayu	1	1	0	0	2.475.000
	- Rak Besi	6	6	0	0	27.780.000
	- Rak Kayu	6	6	0	0	17.545.000
	- Filling Cabinet Besi	41	41	0	0	108.006.600
	- Rotary Filling	22	22	0	0	228.855.000
	- Papan Visual/Papan Nama	1	0	1	0	18.435.000
	- White Board	3	3	0	0	4.805.000
	- Alat Penghancur Kertas	6	6	0	0	19.533.000
	- Mesin Absensi	2	2	0	0	13.112.152
	- Alat Pemotong Kertas	1	1	0	0	500.000
	- Overhead Projector	3	3	0	0	43.264.025
	- Hand Metal Detector	4	4	0	0	4.000.000
	- LCD Proyektor/Infocus	3	3	0	0	50.617.000

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Jumlah Harga (Rp)
			Baik	Sedang	Rusak	
	- Pintu Elektrik (yang memakai akses)	1	1	0	0	43.450.000
	- Papan Pengumuman	7	7	0	0	6.000.000
	- Alat Kantor Lainnya	5	5	0	0	22.744.000
	- Meja Kerja Kayu	4	4	0	0	33.338.000
	- Kursi Besi/Metal	2	2	0	0	4.800.000
	- Meja Rapat	14	14	0	0	45.991.400
	- Meja Podium	1	1	0	0	7.975.000
	- Meja Resepsionis	1	1	0	0	17.950.000
	- Meja Sekolah	95	90	5	0	54.611.700
	- Kasur/Spring Bed	2	2	0	0	2.880.000
	- Kursi Putar	3	3	0	0	5.775.000
	- Sofa	1	1	0	0	6.750.000
	- Mebeleur lainnya	1	1	0	0	10.175.000
	- Mesin Penghisap Debu/ Vacuum Cleaner	1	1	0	0	3.000.000
	- Lemari Es	1	1	0	0	1.700.000
	- AC Window	2	2	0	0	14.650.000
	- AC Split	24	20	4	0	113.754.750
	- Kipas Angin	7	7	0	0	2.962.500
	- Exhause Fan	5	5	0	0	8.770.000
	- Alat Dapur Lainnya	2	2	0	0	4.310.000
	- Televisi	8	7	1	0	78.612.000
	- Loudspeaker	5	5	0	0	5.000.000
	- Wireless	4	4	0	0	9.795.000
	- Microphone	1	1	0	0	5.525.000
	- Unit Power Supply	4	4	0	0	73.018.303
	- Camera Video	5	5	0	0	39.983.400
	- Dispenser	11	11	0	0	28.010.500
	- Handy Cam	1	1	0	0	19.810.000
	- Gordyin/Kray	1	1	0	0	170.824.801
	- Alat Rumah Tangga Lainnya	3	3	0	0	2.195.000
	- Alat Pemadam/Portable	3	3	0	0	4.995.000
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1	0	0	5.995.000
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	2	0	0	5.825.000
	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	1	0	0	2.000.000
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	15	15	0	0	37.950.000
	- Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III	1	1	0	0	770.000
	- Meja Tamu Biasa	1	1	0		1.665.000
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	4	4	0	0	14.223.000
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9	9	0	0	11.850.000
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12	12	0	0	8.650.000
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	8	8	0	0	5.000.000
	- Kursi Kerja Pejabat Lainnya	1	1	0	0	1.065.000
	- Kursi Tamu di depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/ Walikota	1	1	0	0	4.180.000
	- Lemari Buku untuk Perpustakaan	5	5	0	0	7.415.000
5	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	49	49	0	0	180.210.934
	- Audio Amplifier	4	4	0	0	14.300.000
	- Disc Record Player	2	2	0	0	10.500.000
	- Microphone/Wireless Mic	7	7	0	0	19.205.346
	- Microphone Connector Box	1	1	0	0	750.000
	- Audio Master Control Unit	1	1	0	0	2.000.000
	- Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	1	0	0	10.000.000
	- Peralatan Studio Audio Lainnya	2	2	0	0	8.650.000
	- Tripod Camera	5	5	0	0	2.852.000
	- Layar Film/Projector	13	13	0	0	92.528.588
	- Telephone (PABX)	1	1	0	0	5.475.000
	- Handy Talky (HT)	10	10	0	0	10.300.000
	- Facsimile	2	2	0	0	3.650.000

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Jumlah Harga (Rp)
			Baik	Sedang	Rusak	
6	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	7	7	0	0	12.245.500
	- Tensimeter	1	1	0	0	700.000
	- Kursi Dorong	2	2	0	0	3.080.000
	- Alat Kedokteran Umum lainnya	4	4	0	0	8.465.500
	ASET TETAP LAINNYA	149	149	0	0	40.330.000
	BAHAN PERPUSTAKAAN	147	147	0	0	40.030.000
	- Ilmu Pengetahuan Umum	15	15	0	0	3.265.000
	- Buku Umum lain-lain	132	132	0	0	36.765.000
	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/ OLAHRAGA	2	2	0	0	300.000
	- Maket dan Foto Dokumen lain-lain	2	2	0	0	300.000
	ASET LAINNYA	29	29	0	0	433.453.000
	ASET TIDAK BERWUJUD	9	9	0	0	376.149.000
	- Software	9	9	0	0	376.149.000
	ASET LAIN-LAIN	20	20	0	0	57.304.000
	- Peralatan dan Mesin Rusak Berat	20	20	0	0	57.304.000
	GEDUNG DAN BANGUNAN					
	BANGUNAN GEDUNG					988.798.431
	- Bangunan gedung kantor permanen	262,96 M^2	262,96 M^2	0	0	381.300.000
	- Bangunan gudang tertutup permanen	216 M^2	116 M^2	100	0	189.000.000
	- Bangunan gedung pertemuan permanen	199,82 M^2	99,82 M^2	100	0	269.800.000
	- Gedung garasi/pool permanen	42,90 M^2	12,90 M^2	30	0	64.543.880
	- Bangunan gedung tempat kerja lainnya permanen	45,00 M^2	45,00 M^2	0	0	54.752.198
	- Bangunan tempat kerja lain-lain (dst)	6,00 M^2	6,00 M2	0	0	29.402.353
	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI					208.412.000
	JARINGAN					208.412.000
	- Jaringan distribusi tegangan diatas 20 KVA	0 M^2	0 M^2	0	0	37.719.000
	- Jaringan distribusi lain-lain	70,00 M^2	70,00 M^2	0	0	170.693.000

Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, 2024

Berdasar tabel 2.6, sarana dan prasarana perkantoran yang dimiliki oleh BKPSDM Kabupaten Pemalang sebanyak 92,76% dalam kondisi baik sehingga relatif cukup dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Namun, untuk mengikuti perkembangan yang ada diperlukan perbaharuan terhadap beberapa sarana prasarana yang secara usia pemakaian sudah banyak mengalami penyusutan, antara lain kendaraan roda empat untuk operasional dengan usia lebih dari 15 tahun dan sarana prasarana IT mendukung pengembangan sistem informasi layanan kepegawaian. Dan untuk sarana prasarana pendukung *assessment center* belum tersedia, sehingga UPT Penilaian Kompetensi pada BKPSDM Kabupaten Pemalang belum terakreditasi. Agar pelaksanaan meritokrasi dalam manajemen ASN Kabupaten Pemalang dapat terwujud, pemenuhan sarana prasarana *assessment center* harus diprioritaskan pada pelaksanaan kegiatan di tahun 2025-2029.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.1.3.Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang

Gambaran kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.7 dan Tabel 2.8 berikut :

Tabel 2.7.a

Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks			V	64,35	64,48	64,61	64,85	65,10	65,08	64,29	51,63	65,53	78,28	101,13	99,70	79,91	101,04	120,24
2	Persentase kompetensi ASN	Persen			V	57,20	57,20	57,20	57,50	57,80	57,53	57,1	32,2	36,9	68,00	100,57	99,82	56,29	64,17	117,64
3	Persentase kinerja ASN	Persen			V	80,30	80,30	80,30	80,30	80,30	83,37	80,27	72,23	83	83,36	103,82	99,96	89,95	103,36	103,81
4	Persentase tingkat pendidikan ASN	Persen			V	50,10	50,10	50,60	51,10	51,60	48,36	49,52	48,32	83,48	84,46	96,52	98,84	95,49	163,36	163,68
5	Persentase tingkat kedisiplinan ASN	Persen			V	99,70	99,70	99,70	99,70	99,70	99,60	99,80	100	100	99,17	99,89	100,10	100,30	100,30	99,46
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks			V	82,95	83,20	83,45	83,75	83,95	NA	89,89	82,36	83,25	84,78	-	108,04	98,69	99,40	100,98
7	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (PNS tidak tcrmasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen		V		110,81	110,81	115	120	125	NA	NA	191,98	64,62	44,89	-	-	166,93	53,85	35,91
8	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen		V		5,27	5,27	6,00	7,00	8,00	NA	NA	3,79	3,68	13,67	-	-	63,16	52,57	170,87
9	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen		V		1,00	1,00	2,00	3,00	4,00	NA	NA	8,74	12,34	22,94	-	-	437	3.702	573,5
10	Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya	Persen				3,50	3,50	3,60	3,70	3,80	3,50	3,50	3,95	20,57	84,31	100	100	109,72	555,94	2.218,68
11	Persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya	Persen				1,50	1,50	1,60	1,70	1,80	1,50	1,50	2,94	5,49	2,56	100	100	183,75	322,94	142,22
12	Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi	Persen				100	100	100	100	100	100	100	100	100	97,50	100	100	100	100	97,50
13	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya	Persen				1,50	1,50	1,60	1,70	1,80	1,50	1,50	0	21,65	83,62	100	100	-	1.273,52	4.645,55
14	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	Persen				100	100	100	100	100	100	100	82,29	95,00	100	100	100	82,29	95,00	100
15	Persentase Sistem Kepegawaian yang dikembangkan	Persen				100	100	100	100	100	100	100	67,00	80,00	100	100	100	67,00	80,00	100
16	Persentase Tingkat Kedisiplinan ASN	Persen				62,5	65	70	75	80	62,50	65	97,40	98,65	99,89	100	100	139,14	131,53	124,86
17	Nilai SAKIP	Nilai				60,26	60,30	60,35	60,40	60,45	60,26	61,08	61,55	63,10	65,66	100	101,29	101,98	104,47	108,61
18	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks				50,83	50,91	50,99	51,00	51,45	50,83	50,91	54,62	-	-	100	100	107,11	-	-

Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, 2024

https://jdih.pemalangkab.go.id

Secara umum gambaran potensi dan permasalahan pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya tahun 2021-2026, khususnya di tahun 2021 adanya kebijakan Presiden tentang penyederhanaan birokrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional. Nantinya, hasil penyederhanaan ini adalah organisasi pemerintahan ke depan akan berbasis pada fungsional dan kinerja, yang lebih mengedepankan *output* dan keahlian. Dengan adanya kebijakan tersebut, daerah harus mampu merubah proses bisnis organisasi dari model lama yang sudah berjalan ke model baru namun tetap memperhatikan kinerja dan karir ASN serta tidak berdampak buruk bagi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan tabel 2.7.a dapat diketahui bahwa secara umum kinerja BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam mencapai target kinerja dapat terlaksana, khususnya di tahun 2024 dari 18 kinerja terdapat 14 kinerja telah mencapai target dan 4 kinerja tidak mencapai target, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kinerja BKPSDM Kabupaten Pemalang yang mencapai target di tahun 2024, meliputi :
   a. Indeks Profesionalitas ASN
   b. Persentase kompetensi ASN
   c. Persentase kinerja ASN
   d. Persentase tingkat pendidikan ASN
   e. Indeks Kepuasan Masyarakat
   f. Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
   g. Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
   h. Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya
   i. Persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya
   j. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya
   k. Persentase layanan administrasi kepegawaian
   l. Persentase sistem kepegawaian yang dikembangkan
   m. Persentase tingkat kedisiplinan ASN
   n. Nilai SAKIP

   Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :
   a. SDM yang berkompeten;
   b. Sarana dan prasarana yang relatif memadai;
   c. Pelaksanaan upaya peningkatan IP ASN dengan meningkatkan fasilitasi tugas belajar, meningkatkan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi dan mensosialisasikan PP 17 tahun 2020 tentang Manajemen ASN yang memuat bahwa pengembangan kompetensi pada ASN minimal 20 jam pelajaran per tahun, memberi punishment bagi ASN yang kinerjanya dibawah ekspektasi dan yang tidak melaporkan kinerjanya, serta meningkatkan penyelenggaraan sosialisasi dan pembinaan disiplin ASN.
   d. Kerjasama dengan pihak luar (BKPSDM Provinsi, BPSDMD Provinsi, BKN) dalam upaya transfer *knowledge* dan transfer informasi;
   e. Komunikasi yang intens antar instansi.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2. Kinerja BKPSDM Kabupaten Pemalang yang tidak mencapai target di tahun 2024, meliputi :
   a. Persentase tingkat kedisiplinan ASN tidak mencapai target disebabkan terdapat 0,83% ASN mendapat hukuman disiplin di tahun 2024. Untuk itu, di tahun mendatang diperlukan sosialisasi dan pembinaan disiplin ASN yang lebih intensif.
   b. Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak tcrmasuk guru dan tenaga kesehatan) tidak mencapai target disebabkan saat penentuan target di RPJMD rumus yang digunakan sesuai Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu : jumlah pegawai menurut pendidikan perguruan tinggi keatas dibagi jumlah pegawai dengan pendidikan SMA kebawah dikali 100%. Namun untuk pengisian data LPPD sesuai Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2024 dihitung dengan rumus : jumlah pegawai menurut pendidikan perguruan tinggi keatas dibagi seluruh jumlah pegawai. Untuk itu, di tahun mendatang perlu lebih cermat dalam penentuan target kinerja.
   c. Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi tidak mencapai target disebabkan terdapat 2,5% ASN tidak melaporkan kinerjanya melalui e-kinerja BKN. Untuk itu, di tahun mendatang diperlukan monitoring dan evaluasi pengisian e-kinerja BKN secara lebih intensif dan perlu diberikan *punishment* kepada ASN yang tidak melaporkan kinerjanya.
   d. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) tidak mencapai target disebabkan sampai dengan 31 Desember 2024 nilai IRB BKPSDM Kabupaten Pemalang hasil penilaian Inspektorat Kabupaten Pemalang belum rilis.

Tabel 2.7.b
Pencapaian Kinerja Manajemen ASN pada BKPSDM Kabupaten Pemalang
Tahun 2020–2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai Penerapan Sistem Merit	Nilai	NA	122,5	NA	238,5	262,5
2.	Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	Indeks	NA	NA	NA	62,18	88,42

Sumber : BKPSDM Kabupaten Pemalang, 2024

Penerapan sistem merit bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang profesional, netral, dan berintegritas. Penilaian sistem merit di Kabupaten Pemalang dimulai di tahun 2021 dengan nilai sebesar 122,5 (kategori “BURUK”). Di tahun 2022 telah dilaksanakan penilaian, namun berita acara hasil penilaian tidak terbit karena terjadi OTT KPK. Selanjutnya di tahun 2023 pelaksanaan sistem merit mendapat nilai sebesar 238,5 (kategori “KURANG”) dan di tahun 2024 mendapat nilai 262,5 dengan kategori “BAIK”. Hal ini merupakan capaian yang baik, dan menjadi bukti kongkrit jika Pemerintah Kabupaten Pemalang mampu melaksanakan Manajemen ASN dengan baik sesuai dengan Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja. Meskipun demikian, hal yang perlu diantisipasi adalah ketersediaan SDM Kabupaten Pemalang yang semakin sedikit, baik karena distribusi ASN yang tidak merata di semua OPD, maupun karena tingginya angka pensiun dan tidak sebanding dengan SDM yang diterima dari mekanisme pengadaan murni. Pengadaan CASN yang tidak dapat dipastikan setiap tahunnya, sehingga Pemerintah Kabupaten Pemalang hanya mengandalkan dari ASN yang

https://jdih.pemalangkab.go.id

mutasi masuk ke Pemerintah Kabupaten Pemalang yang jumlahnya tidak signifikan. Kinerja BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan distribusi ASN dalam Jabatan juga terpengaruh ketika pasca kebijakan penyetaraan jabatan struktural ke fungsional diterapkan, sehingga BKPSDM Kabupaten Pemalang harus segera menyesuaikan dan kembali melakukan penguatan Manajemen Talenta ASN. Pengisian PNS dalam jabatan harus tetap dilaksanakan secara objektif dan transparan, berdasarkan integritas, kualifikasi, kompetensi, kinerja dan rekam jejak jabatan secara adil dan wajar dalam kerangka Manajemen Talenta dengan berpedoman pada pola karir instansi dan nasional.

Penilaian sistem merit terdiri dari 8 aspek, yaitu : (1) perencanaan kebutuhan, (2) pengadaan, (3) pengembangan karir, (4) promosi dan mutasi, (5) manajemen kinerja, (6) penggajian, penghargaan, dan disiplin, (7) perlindungan dan pelayanan, dan (8) sistem informasi, dengan nilai per aspek sebagai berikut :

Tabel 2.7.c
Nilai Penerapan Sistem Merit Per Aspek
Tahun 2021-2024

No	Aspek	2021		2022		2023		2024	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
1	Perencanaan kebutuhan	17,5	43,75	NA	NA	37,5	93,75	40	100
2	Pengadaan	16	40	NA	NA	32	80	34	85
3	Pengembangan karir	12,5	9,61	NA	NA	32,5	25	42,5	32,69
4	Promosi dan mutasi	27,5	68,75	NA	NA	22,5	56,25	22,5	56,25
5	Manajemen kinerja	12,5	15,63	NA	NA	55	68,75	60	75
6	Penggajian, penghargaan dan disiplin	17,5	43,75	NA	NA	30	75	32,5	81,25
7	Perlindungan dan pelayanan	8	50	NA	NA	12	75	14	87,5
8	Sistem informasi	11	45,83	NA	NA	17	70,83	17	70,83

Sumber : BKPSDM Kabupaten Pemalang, 2024

Untuk meningkatkan nilai penerapan sistem merit kedepan, perlu dilakukan upaya peningkatan pada aspek sistem merit yang mempunyai capaian dibawah 80% yaitu aspek pengembangan karir, aspek promosi dan mutasi, aspek manajemen kinerja dan aspek sistem informasi.

Sedangkan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) Manajemen ASN merupakan aturan yang menjadi landasan bagi instansi pemerintah dalam mengelola ASN. Di tahun 2024, indeks implementasi NSPK Manajemen ASN Pemerintah Kabupaten Pemalang sebesar 88,42 dengan kategori “Unggul”. Untuk meningkatkan kualitas manajemen ASN Pemerintah Kabupaten Pemalang, akan dilakukan upaya berupa melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi dari tim penilai Sistem Merit dan NSPK dari BKN.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.8.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran Pada Tahun (dalam juta)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (dalam juta)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.544					1.407					91,14						
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	833					788					94,65						
Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	50					45					90,24						
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	69					69					99,85						
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	22					16					77						
Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	16					15					92,19						
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	1.080					1.005					93,04						
Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian	2.428					2.005					82,58						
Program Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur	299					281					94,06						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		8.837	9.228	8.227	8.772		8.371	8.502	7.934	7.763		94,73	92,14	96,43	88,49	0,07	-2,42
Program Kepegawaian Daerah		4.084	5.756	7.210	6.176		3.217	4.348	6.288	5.581		78,79	75,53	87,22	90,37	17,29	22,84
Rata-rata											88,83	89,69	85,76	92,13	89,27		

Sumber : BKPSDM Kabupaten Pemalang, 2024

https://jdih.pemalangkab.go.id

Berdasar tabel 2.8, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu tahun 2021-2024 rasio antara realisasi dan anggaran BKPSDM Kabupaten Pemalang cenderung fluktuatif namun masih masuk dalam kategori baik karena diatas 85%. Rasio realisasi anggaran dibawah 85% terjadi di tahun 2021 dan 2022 pada Program Kepegawaian Daerah, hal tersebut disebabkan :

1. Tahun 2021
   a. Biaya *assessment* untuk JPTP di UNS sesuai proposal sebesar Rp6.000.000,00 per orang, namun harga yang diperoleh sebesar Rp4.000.000,00 per orang sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak terserap.
   b. Kegiatan *assessment* untuk pejabat eselon III, eselon IV dan pelaksana tidak dilaksanakan karena adanya pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19.
   c. Kegiatan inspeksi mendadak kedisiplinan ASN tidak dilaksanakan karena adanya pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19.
2. Tahun 2022
   a. Sesuai arahan BKN dan KemenPANRB pengadaan CASN tahun 2022 hanya untuk PPPK sehingga anggaran yang telah dialokasikan untuk pengadaan CPNS tidak terserap.
   b. Pengadaan CASN tahun 2022, Daerah tidak boleh menyelenggarakan secara mandiri, harus menginduk pada BKN sehingga anggaran yang telah dialokasikan untuk pengadaan CASN tidak terserap.
   c. Seleksi terbuka Sekretaris Daerah dan JPTP tidak dapat dilaksanakan karena surat ijin dari Gubernur Jawa Tengah belum turun.
   d. Adanya pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan rapat dan koordinasi dilaksanakan secara daring sehingga anggaran yang telah dialokasikan untuk koordinasi dan konsultasi tidak terserap.

Sedangkan untuk pertumbuhan anggaran pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota selama kurun waktu tahun 2021-2024 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,07% setiap tahunnya dan pada program kepegawaian daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 17,29% setiap tahunnya.

2.1.4.Kelompok Sasaran Layanan BKPSDM Kabupaten Pemalang

Sasaran layanan BKPSDM Kabupaten Pemalang adalah ASN Kabupaten Pemalang sejumlah 10.933 orang, yang terdiri atas 7.790 orang PNS dan 3.143 orang PPPK dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.9
Jumlah ASN Kabupaten Pemalang Tahun 2024

Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
PNS	3.437	4.353	7.790
PPPK	948	2.195	3.143
ASN	4.385	6.548	10.933

Sumber : BKPSDM Kabupaten Pemalang, 2024

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis BKPSDM Kabupaten Pemalang

2.2.1. Permasalahan Pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang

Permasalahan adalah gambaran bentuk kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Perumusan permasalahan merupakan dasar untuk merumuskan strategi, arah kebijakan dan kinerja perangkat daerah. Perumusan permasalahan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam pengelolaan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan pada tahun sebelumnya sesuai kewenangan yang dimilikinya. Permasalahan yang ada merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat ini. Suatu permasalahan dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan langsung dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pemetaan permasalahan pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang dilakukan dengan menyusun pohon masalah dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.10
Pemetaan Permasalahan Pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Distribusi penempatan ASN dalam jabatan yang tepat belum berjalan sesuai kebutuhan	1. Perencanaan dan pengadaan pegawai belum sesuai kebutuhan	1. Kebijakan perencanaan dan pengadaan pegawai sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat yang tidak dapat diintervensi 2. Kebijakan perencanaan dan pengadaan ASN yang berubah-ubah 3. Formasi yang disetujui tidak sama dengan yang diusulkan 4. Belum tersedia data base kebutuhan ASN yang realtime
		2. Manajemen talenta belum berjalan sesuai kebutuhan	1. Belum tersedianya standar kompetensi pada seluruh level jabatan; 2. Kebijakan terkait implementasi pola karir yang sangat dinamis; 3. Penilaian potensi dan kompetensi belum dijadikan dasar utama dalam pengembangan karir.
		3. Kualifikasi pendidikan ASN belum sesuai dengan jabatan	1. Perubahan kebijakan terkait ketentuan Pencantuman Gelar bagi PNS yang telah selesai menempuh pendidikan; 2. Belum terukurnya pemanfaatan PNS yang telah selesai menempuh pendidikan lebih tinggi; 3. Pembinaan ASN jabatan fungsional belum optimal pasca penyederhanaan birokrasi; 4. Kebijakan pengembangan karir ASN jabatan fungsional sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat yang tidak dapat diintervensi.

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		4. Pemetaan kompetensi ASN belum sesuai kebutuhan	1. Belum tersedianya sarana prasarana dan SDM yang memadai dalam pengelolaan *Assessment Center.*
		5. Belum optimalnya kinerja riil individu dalam mendukung kinerja organisasi	1. Penilaian kinerja individu belum sepenuhnya didasarkan pada kinerja riil; 2. Kinerja individu belum terintegrasi dengan kinerja organisasi; 3. Analisis kesenjangan kinerja yang tersedia belum memuat penyebab dan upaya perbaikan yang akan dilakukan; 4. Belum sepenuhnya mengakomodir kebijakan penghargaan finansial dan non finansial; 5. Tingginya angka pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian; 6. Perlindungan ASN belum berjalan sesuai dengan regulasi.
		6. Kualitas layanan administrasi kepegawaian belum sesuai dengan kebutuhan	1. Infrastruktur dan jaringan IT butuh peningkatan; 2. *Back up* data kepegawaian yang tersedia belum sesuai kebutuhan; 3. Proses bisnis layanan kepegawaian merupakan kebijakan pemerintah pusat yang tidak dapat diintervensi; 4. Kebijakan kenaikan pangkat ASN bergantung dan beririsan pada kebijakan pengelolaan ASN lainnya; 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Data dan Dokumen Kepegawaian perlu di *up date*; 6. Perkembangan Teknologi Informasi yang sangat dinamis; 7. Anggaran yang tersedia belum sepenuhnya mencukupi dalam pengembangan sistem; 8. Proses transformasi pengelolaan dokumen fisik ke digital belum berjalan maksimal.
2	Profesionalitas ASN belum sesuai dengan kebutuhan	1. Pengembangan kompetensi belum berjalan sesuai dengan kebutuhan	1. Belum tersedianya rencana kebutuhan pengembangan SDM; 2. Pengiriman peserta pengembangan kompetensi belum sesuai kebutuhan; 3. Keterbatasan penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi secara mandiri; 4. Belum terukurnya pemanfaatan PNS yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.2.2.Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu strategis dapat dirumuskan melalui simpulan dari permasalahan perangkat daerah yang merupakan hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, isu strategis lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) yang menjadi tantangan perangkat daerah kedepan yang bersumber dari sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah, implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah, hasil penjaringan masukan *stakeholder* oleh perangkat daerah serta potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis BKPSDM Kabupaten Pemalang dirumuskan dengan memperhatikan potensi dan permasalahan serta mempertimbangkan isu KLHS, isu strategis global, nasional, dan regional.

a. Telaah Isu Strategis Pemerintah Pusat

1) Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Isu strategis BKN tahun 2025-2029, meliputi :

a) **Meningkatkan kapasitas instansi pemerintah dalam manajemen ASN dan profesionalitas pegawai ASN berbasis prinsip meritokrasi;**
b) **Meningkatkan kapasitas kelembagaan BKN yang lincah, profesional, dan akuntabel serta berbasis digital.**

Dari 2 isu strategis BKN, semua relevan dengan BKPSDM Kabupaten Pemalang.

2) Kementerian PAN RB

Isu strategis KemenPAN RB tahun 2025-2029, meliputi :

a) Peningkatan kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif, dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi
b) **Peningkatan ASN yang profesional, berintegritas dan sejahtera**
c) **Peningkatan instansi pemerintah yang efektif dan akuntabel**
d) Peningkatan birokrasi yang bersih dan berintegritas
e) **Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima**
f) Peningkatan efektivitas reformasi birokrasi nasional
g) Peningkatan kelembagaan Kementerian PAN RB yang efektif dan efisien
h) Peningkatan ASN Kementerian PAN RB yang profesional, berintegritas dan sejahtera
i) Peningkatan Kementerian PAN RB yang berkinerja tinggi dan akuntabel
j) Peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian PAN RB yang prima

Dari 10 isu strategis Kementerian PAN RB, yang relevan dengan BKPSDM Kabupaten Pemalang adalah “peningkatan ASN yang profesional, berintegritas dan sejahtera; peningkatan instansi pemerintah yang efektif dan akuntabel; peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima”

https://jdih.pemalangkab.go.id

3) Kementerian Dalam Negeri

Isu strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2025-2029, meliputi:

a) Peningkatan kualitas demokrasi Indonesia
b) Peningkatan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah
c) Peningkatan kewaspadaan nasional
d) Peningkatan kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas
e) **Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri**
f) Peningkatan harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah
g) Peningkatan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif
h) Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan
i) Peningkatan tata kelola penyelenggaraan kewilayahan
j) Peningkatan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
k) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas
l) Peningkatan kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Dari 12 isu strategis Kementerian Dalam Negeri, yang relevan dengan BKPSDM Kabupaten Pemalang adalah “peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri”

b. Telaah Isu Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

1) BKD Provinsi Jawa Tengah

Isu strategis BKPSDM Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029, meliputi :

a) **Tingginya gelombang pensiun ASN tidak diimbangi dengan jumlah ASN yang diterima dari jalur pengadaan Murni, ditambah dengan kebijakan penerimaan CASN yang selalu berubah-ubah setiap tahunnya;**
b) **Diperlukan peta jalan pengembangan kompetensi jalur pendidikan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah;**
c) **Belum tersedianya profil kompetensi untuk seluruh ASN yang disusun secara *realtime*;**
d) **Penilaian kinerja belum mampu memotret kinerja riil ASN dan belum dijadikan dasar dalam pengembangan karir;**
e) **Belum opimalnya implementasi manajemen talenta pada seluruh level dan jenis jabatan ASN;**
f) **Tingkat akurasi, kelengkapan, dan keamanan data serta dokumen kepegawaian yang masih rendah;**
g) **Belum seimbangnya reward and punishment bagi ASN;**
h) **Perlu kesiapan secara matang baik infrastruktur, jaringan, securitas, SDM dan anggaran dalam Digitalisasi Manajemen ASN.**

Dari 8 isu strategis BKD Provinsi Jawa Tengah, semua relevan dengan BKPSDM Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2) BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

Isu strategis BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029, meliputi :

a) **Peningkatan terpenuhinya hak pengembangan kompetensi ASN;**
b) **Peningkatan terpenuhinya kebutuhan sertifikasi kompetensi ASN;**
c) **Peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah;**
d) Peningkatan kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah

Dari 4 isu strategis BPSDMD Provinsi Jawa tengah, yang relevan dengan BKPSDM Kabupaten Pemalang adalah "peningkatan terpenuhinya hak pengembangan kompetensi ASN, peningkatan terpenuhinya kebutuhan sertifikasi kompetensi ASN, peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah"

c. Telaah Isu Strategis Pemerintah Kabupaten Pemalang

Isu strategis Pemerintah Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029, meliputi :

1) Ketahanan pangan dalam memenuhi ketersediaan pangan masyarakat
2) Pemerataan pembangunan infrastruktur dan penataan kota berkualitas
3) Perkuatan fondasi pembangunan ekonomi hijau dan penanggulangan risiko bencana
4) Sumberdaya manusia yang berdaya saing, berkualitas dan berkarakter
5) Akselerasi pengentasan kemiskinan
6) **Reformasi tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi**
7) Penguatan ketahanan budaya masyarakat

Dari 7 isu strategis Pemerintah Kabupaten Pemalang, yang relevan dengan BKPSDM Kabupaten Pemalang adalah "reformasi tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi".

Dari hasil identifikasi, inventarisasi dan penetapan skala prioritas permasalahan-permasalahan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dapat dirumuskan menjadi isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Pemalang serta berpengaruh dalam pengembangan kinerja pelayanan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan di masa yang akan datang dapat dijelaskan pada tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.11.
Identifikasi Isu Strategis BKPSDM Kabupaten Pemalang

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan BKPSDM Kabupaten Pemalang	Isu KLHS yang Relevan dengan BKPSDM Kabupaten Pemalang	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan BKPSDM Kabupaten Pemalang			Isu Strategis BKPSDM Kabupaten Pemalang
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah ASN yang besar, di tahun 2024 sebanyak 10.933 orang	• Perencanaan dan pengadaan pegawai belum sesuai kebutuhan • Manajemen talenta belum berjalan sesuai kebutuhan • Kualifikasi pendidikan ASN belum sesuai dengan jabatan • Pemetaan kompetensi ASN belum sesuai kebutuhan • Belum optimalnya kinerja riil individu dalam mendukung kinerja organisasi • Kualitas layanan administrasi kepegawaian belum sesuai dengan kebutuhan • Pengembangan kompetensi belum berjalan sesuai dengan kebutuhan	Belum optimalnya budaya *e-government*	Tingginya kebutuhan talenta unggul	• Peluang bonus demografi dan penyiapan talenta yang unggul • Ketimpangan distribusi talenta ASN • Belum berjalannya manajemen talenta nasional	• Kebutuhan talenta yang sesuai dengan arah kebijakan Pembangunan daerah • Tingginya jumlah non ASN	Pelaksanaan meritokrasi dalam manajemen ASN belum berjalan sesuai dengan kebutuhan

Berdasar tabel 2.11 dapat disimpulkan bahwa isu strategis BKPSDM Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 adalah pelaksanaan meritokrasi dalam manajemen ASN belum berjalan sesuai dengan kebutuhan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis untuk menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang yang mengarahkan pada perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan. Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra;
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi;
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Renstra.

BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan mampu bersaing di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, maka BKPSDM Kabupaten Pemalang harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan komprehensif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja. Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, BKPSDM Kabupaten Pemalang secara proaktif berperan dalam meningkatkan kualitas manajemen dan SDM ASN.

Tujuan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang harus berdasar pada sasaran Daerah yang termuat dalam RPJMD. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah : **“PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA”**. Visi ini memiliki pembentuk kata :

1. **Bersih** : Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan.
2. **Cakap** : dimaknai memiliki sumber daya manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
3. **Handal** : dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.

https://jdih.pemalangkab.go.id

4. **Mulya** : Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. Resik: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih.
   Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik.
2. Hijau: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sector unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau, yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan) yang ramah lingkungan, industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM dimasyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.
3. Apik: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penaatan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dari Desa.
4. Peduli: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi.
5. Silaturahmi: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong,tepa selira dan sejahtera.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, dan saling menghormati dan teposliro.
6. Organisatoris: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan *Good Governance*, *Clean Governance* dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.

https://jdih.pemalangkab.go.id

7. Digitalisasi: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi.
8. Ikhlas: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkan kearifan dan budaya lokal.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang tersebut, BKPSDM Kabupaten Pemalang mendukung visi **Handal** dan misi **Organisatoris** yaitu **meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi** yang dicapai melalui tujuan daerah berupa **meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel** dengan indikator tujuan **Indeks Reformasi Birokrasi**. Dalam meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel ditentukan sasaran daerah berupa **meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik** dengan indikator sasaran **nilai SAKIP, maturitas SPIP, dan Indeks Pelayanan Publik**. BKPSDM Kabupaten Pemalang mendukung sasaran daerah berupa **meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik** dengan indikator kinerja **maturitas SPIP**.

Mendasari sasaran Daerah berupa meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik, BKPSDM Kabupaten Pemalang merumuskan tujuan jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2025–2029, yaitu **mewujudkan meritokrasi dalam manajemen ASN**, yaitu pengelolaan ASN didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, serta dilaksanakan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Tujuan ini diukur dengan indikator **nilai penerapan sistem merit** yang merupakan hasil penilaian dari BKN. Penerapan meritokrasi tersebut akan memastikan bahwa ASN yang berprestasi dan kompeten memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir mereka, mendukung efektivitas pemerintahan, dan berkontribusi pada kemajuan bangsa.

3.2. Sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program, yang dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan serta disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis serta memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable relevant, time bond* dan *continously improve* (SMART-C). Sasaran Renstra menjadi dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Untuk mencapai tujuan mewujudkan meritokrasi dalam manajemen ASN, BKPSDM Kabupaten Pemalang mempunyai 3 (tiga) sasaran jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2025–2029, yaitu :

1. **“Terwujudnya distribusi penempatan ASN dalam jabatan yang tepat”** yang diukur dengan indikator **nilai aspek pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, sistem informasi** yang merupakan hasil penilaian dari BKN. Penempatan ASN dalam jabatan yang tepat akan meningkatkan efektivitas kerja, produktivitas, serta kepuasan kerja, baik bagi individu maupun organisasi.
2. “**Meningkatnya profesionalitas ASN**” yang diukur dengan indikator **Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)** yang merupakan hasil penilaian dari BKN. Peningkatan profesionalitas ASN adalah kunci untuk mewujudkan meritokrasi yang kuat karena akan meningkatkan efektivitas pemerintah, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan ASN.
3. “Meningkatnya **kualitas layanan urusan pemerintahan**” yang diukur dengan indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** yang merupakan hasil survei kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi kepegawaian yang telah dilaksanakan. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian merupakan langkah penting untuk mewujudkan meritokrasi. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, maka sistem merit dapat diterapkan secara lebih efektif.

Keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang dapat digambarkan sebagai berikut :

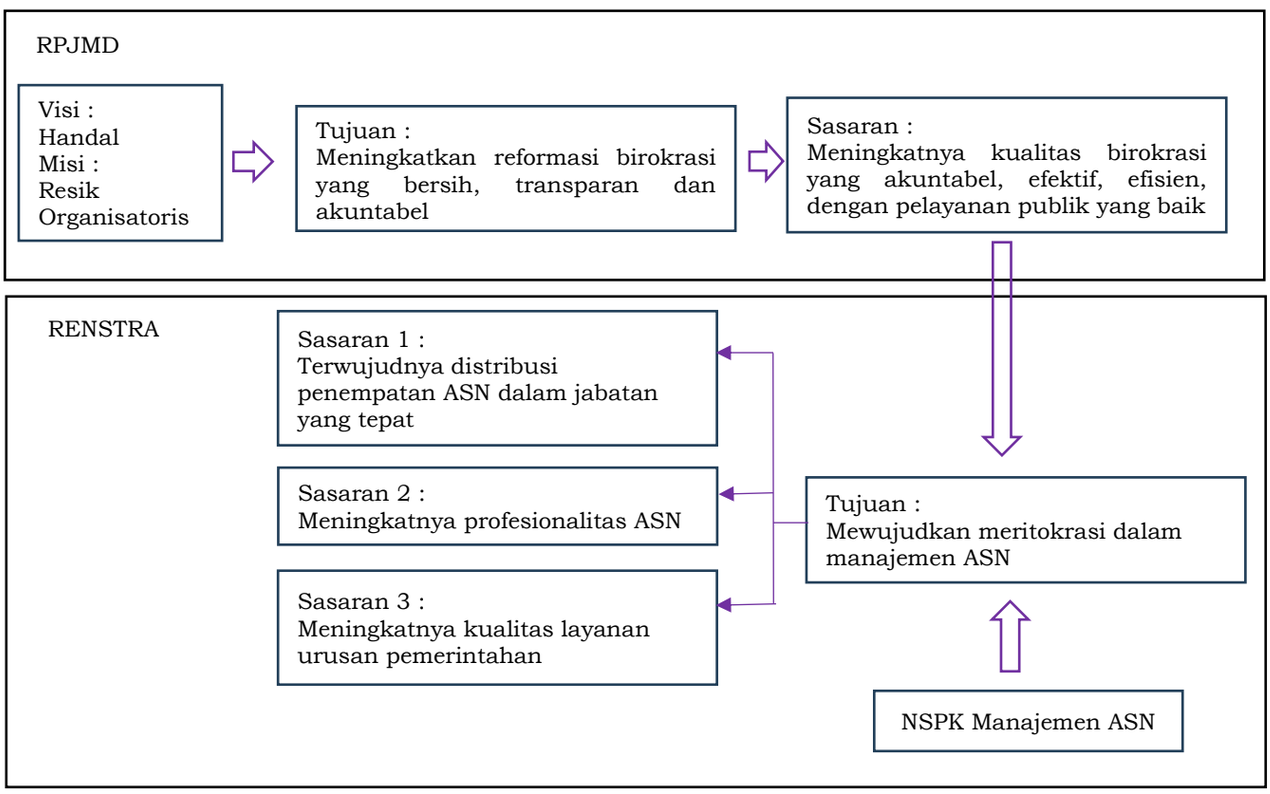

Gambar 3.1
Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra

Selanjutnya rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah BKPSDM Kabupaten Pemalang dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	14
Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik			Maturitas SPIP	Level	2,430	2,935	2,945	2,955	2,965	2,975	2,985	2,995	2,995
	Mewujudkan meritokrasi dalam manajemen ASN		Nilai Penerapan Sistem Merit	Nilai	238,5	262,5	273,0	283,5	294,0	304,5	315,0	325,5	325,5
		Terwujudnya distribusi penempatan ASN dalam jabatan yang tepat	Nilai Aspek Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi, Manajemen Kinerja, Sistem Informasi	Nilai	127	142	148	154	160	166	172	178	178
		Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	65,53	78,28	78,3	78,32	78,34	78,36	78,38	78,4	78,4
		Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83,25	84,78	84,98	85,18	85,38	85,58	85,78	85,98	85,98

https://jdih.pemalangkab.go.id

3.3. Strategi BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program yang bersifat indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dan merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan yang telah ditetapkan yang dijabarkan dalam kebijakan dan program. Strategi diperlukan dalam memanajemen setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai sebuah kesatuan cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang memiliki.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran, strategi dijabarkan dalam arah kebijakan dalam pencapaian pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, yang dikembangkan dengan prinsip untuk dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang, memenuhi kebutuhan layanan yang berbeda tiap *segment* pengguna layanan dan pemangku kepentingan, bernilai tambah dan berkelanjutan, dengan tahapan penentuannya yang meliputi :

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan dan isu-isu strategis;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi;
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*);
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran.

Strategi BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, meliputi:

1. Sasaran 1 : Terwujudnya distribusi penempatan ASN dalam jabatan yang tepat. Pencapaian sasaran ini diarahkan melalui strategi :
   a. Perencanaan kebutuhan ASN berdasarkan peta jabatan, beban kerja dengan mempertimbangkan ASN akan pensiun dalam 5 (lima) tahun;
   b. Pengadaan ASN yang transparan dan kompetitif, baik dari jalur pengadaan maupun mutasi dari instansi lain;
   c. Pengembangan karir ASN melalui manajemen talenta, pembentukan *talent pool* dan rencana suksesi;
   d. Promosi, mutasi dan rotasi secara obyektif dan transparan berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, rekam jejak dan persyaratan objektif lainnya;
   e. Manajemen kinerja secara terukur melalui penetapan target, evaluasi kinerja yang obyektif, identifikasi kesenjangan kinerja dan strategi mengatasinya;
   f. Penggajian, penghargaan dan dan penegakan disiplin dan kode etik serta kode perilaku ASN;
   g. Perlindungan ASN dan peningkatan kualitas layanan kepegawaian;
   h. Penyediaan sistem informasi dan digitalisasi layanan kepegawaian.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2. Sasaran 2 : Meningkatnya profesionalitas ASN.
   Pencapaian sasaran ini diarahkan melalui strategi pengembangan SDM ASN dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi atau mengirimkan peserta untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi.
3. Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan.
   Pencapaian sasaran ini diarahkan melalui strategi memperbaiki pelayanan yang diberikan dengan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi atas hasil survei kepuasan masyarakat.

Selanjutnya pentahapan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang selama kurun waktu tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyiapan regulasi dan sarana prasarana pengembangan karir ASN	Peningkatan pengembangan karir ASN	Optimalisasi ASN kompeten	Peningkatan nilai sistem merit menjadi “Sangat Baik”	Penerapan manajemen talenta

Tahun 2026 **Penyiapan regulasi dan sarana prasarana pengembangan karir ASN**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan dengan berkoordinasi dengan Bagian Organisasi;
2. Penyusunan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi;
3. Penyusunan rencana suksesi yang sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi;
4. Penyusunan kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;
5. Penyusunan regulasi mengenai pola karir;
6. Penyusunan analisis permasalahan kinerja dan strategi penyelesaian;
7. Penyusunan *talent pool* berdasarkan pemetaan kompetensi kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja;
8. Penyediaan sarana prasarana *assessment center*.

Tahun 2027 **Peningkatan pengembangan karir ASN**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Penyusunan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi;
2. Lanjutan penyusunan *talent pool* berdasarkan pemetaan kompetensi kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja;
3. Penyusunan kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;
4. Penyusunan *Human Capital Development Plan* (HCDP);
5. Penyusunan analisis permasalahan kinerja dan strategi penyelesaian;
6. Pelaksanaan *assessment* untuk Pelaksana dan Fungsional Pertama.

Tahun 2028 **Optimalisasi ASN kompeten**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Penyusunan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi;
2. Penyusunan kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;

https://jdih.pemalangkab.go.id

3. Penyusunan analisis permasalahan kinerja dan strategi penyelesaian;
4. Peningkatan kompetensi melalui penyelenggaraan diklat selain latsar, fungsional dan diklatpim; praktik kerja dan pertukaran pegawai; serta *coaching* dan mentoring;
5. Pelaksanaan *assessment* untuk Administrator, Pengawas, Fungsional Muda.

Tahun 2029 **Peningkatan nilai sistem merit menjadi "Sangat Baik"**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Penyusunan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi;
2. Penyusunan kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;
3. Penyusunan analisis permasalahan kinerja dan strategi penyelesaian;
4. Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengembangan karir ASN;
5. Penggunaan *assessment center* dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi.

Tahun 2030 **Penerapan manajemen talenta**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Penyusunan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi;
2. Penyusunan kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;
3. Penyusunan analisis permasalahan kinerja dan strategi penyelesaian;
4. Penggunaan SIMATA (Sistem Informasi Manajemen Talenta) BKN dalam penempatan ASN;
5. Penggunaan SIMATA (Sistem Informasi Manajemen Talenta) BKN dalam pengisian JPT, Administrator dan Pengawas.

Berdasar pentahapan Renstra tersebut, diharapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan mampu mewujudkan meritokrasi dalam manajemen ASN, mampu mendukung perwujudan ASN profesional yang berdaya saing, dan layanan kepegawaian yang terintegrasi.

3.4. Arah Kebijakan BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya juga merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan/sub kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan berguna untuk menjamin ketercapaian, kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan dan mengantisipasi isu strategis, yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi, yang memberikan arahan dan panduan hasil rumusan strategi yang dipilih agar lebih optimal dalam mencapai tujuan dan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun mendukung pencapaian sasaran daerah dengan memperhitungkan dan antisipasi terhadap semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Melalui strategi dan arah kebijakan maka akan terumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan tujuan daerah dan sasaran perencanaan pembangunan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. Selain itu, strategi dan arah kebijakan juga merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Dalam menentukan arah kebijakan Renstra, perlu mendasari pada NSPK dan arah kebijakan RPJMD. Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN 2. Pengadaan ASN 3. Pengangkatan ASN 4. Pangkat 5. Mutasi 6. Jabatan 7. Pengembangan Karier ASN 8. Pola Karier 9. Penggajian, Tunjangan, Fasilitas 10. Penghargaan 11. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua 12. Perlindungan 13. Penilaian kinerja 14. Cuti 15. Kode etik 16. Disiplin 17. Pemberhentian 18. Pensiun	1. Peningkatan kapasitas pegawai dengan fokus pendidikan dan pelatihan	1. Penyusunan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah (5 tahun) yang sudah ditetapkan PPK; 2. Penyediaan data kepegawaian secara lengkap dan *real time* sesuai jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi; 3. Penyediaan data pegawai yang akan pensiun dalam 5 (lima) tahun sesuai jabatan, pangkat, unit kerja dan pendidikan terakhir; 4. Penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan ASN untuk jangka 5 (lima) tahun, baik dari jalur pengadaan murni maupun dari jalur mutasi eksternal; 5. Penyusunan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan beserta payung hukumnya; 6. Penerimaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif; 7. Fasilitasi pelatihan dasar (Latsar) bagi CPNS; 8. Penempatan dan pengangkatan ASN sesuai formasi jabatan yang dilamar; 9. Penyelesaian skema pengangkatan PPPK paruh waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 10. Dengan berkoordinasi dengan Bagian Organisasi menyusun standar kompetensi jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan; 11. Penyusunan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi;	

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			12. Penyusunan *Talent Pool* yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi dan hasil penilaian kinerja; 13. Penyusunan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbang kan pola karir instansi; 14. Penyusunan informasi tentang kesenjangan kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai; 15. Penyusunan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja ASN dalam rangka peningkatan kapasitas ASN; 16. Fasilitasi pengiriman dan penyelenggaraan diklat untuk mengatasi kesenjangan; 17. Peningkatan kompetensi melalui *coaching,* mentoring, praktik kerja dan pertukaran pegawai; 18. Peningkatan kompetensi melalui jalur pendidikan formal; 19. Penyusunan dan penetapan kebijakan tentang pola karir ASN; 20. Pelaksanaan dan penyediaan kebijakan tentang pengisian Jabatan Manajerial secara terbuka dan kompetitif serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada *talent pool* dan rencana suksesi; 21. Penyediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis; 22. Pengembangan metode penilaian kinerja yang obyektif; 23. Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja; 24. Penyediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi mewujudkan tujuan organisasi; 25. Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir; 26. Pemberian tunjangan kinerja berdasarkan kelas jabatan, penilaian kinerja dan aspek objektif lainnya; 27. Pemberian penghargaan yang bersifat finansial dan non finansial kepada ASN yang berprestasi;	

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			28. Pembinaan dan penegakkan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN; 29. Pengelolaan data pelanggaran disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN yang terintegrasi dengan *data base* kepegawaian lainnya; 30. Memperluas kebijakan perlindungan pegawai (di luar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun yang diselenggarakan secara nasional); 31. Penyediaan fasilitas yang memudahkan ASN dalam mendapatkan layanan administrasi kepegawaian; 32. Penyempurnaan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis *online* yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai; 33. Penerapan *e-performance*/e-kinerja yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis *online*; 34. Penggunaan *e-office* yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian; 35. Pembangunan dan penggunaan *asessment center* dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi; 36. Penyediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang efektif dan obyektif serta administrasi keuangan yang akuntabel; 37. Penyediaan administrasi kepegawaian, administrasi umum, sarana prasarana kantor serta jasa penunjang untuk memperlancar pelaksanaan tugas.	

Dari uraian di atas dapat disimpulkan rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan meritokrasi dalam manajemen ASN	1. Terwujudnya distribusi penempatan ASN dalam jabatan yang tepat	1. Perencanaan kebutuhan ASN berdasarkan peta jabatan, beban kerja dengan mempertimbangkan ASN akan pensiun dalam 5 (lima) tahun	1. Penyusunan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah (5 tahun) yang sudah ditetapkan PPK
			2. Penyediaan data kepegawaian secara lengkap dan *real time* sesuai jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi
			3. Penyediaan data pegawai yang akan pensiun dalam 5 (lima) tahun sesuai jabatan, pangkat, unit kerja dan pendidikan terakhir
			4. Penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan ASN untuk jangka 5 (lima) tahun, baik dari jalur pengadaan murni maupun dari jalur mutasi eksternal
		2. Pengadaan ASN yang transparan dan kompetitif, baik dari jalur pengadaan maupun mutasi dari instansi lain	1. Penyusunan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan beserta payung hukumnya
			2. Penerimaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif
			3. Penempatan dan pengangkatan ASN sesuai formasi jabatan yang dilamar
			4. Penyelesaian skema pengangkatan PPPK paruh waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		3. Pengembangan karir ASN melalui manajemen talenta, pembentukan *talent pool* dan rencana suksesi	1. Dengan berkoordinasi dengan Bagian Organisasi menyusun standar kompetensi jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan
			2. Penyusunan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi
			3. Penyusunan *Talent Pool* yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi dan hasil penilaian kinerja
			4. Penyusunan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbang kan pola karir instansi
			5. Penyusunan informasi tentang kesenjangan kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai
			6. Penyusunan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja ASN dalam rangka peningkatan kapasitas ASN

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			7. Peningkatan kompetensi melalui *coaching*, mentoring, praktik kerja dan pertukaran pegawai
			8. Peningkatan kompetensi melalui jalur pendidikan formal
		4. Promosi, mutasi dan rotasi secara obyektif dan transparan berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, rekam jejak dan persyaratan objektif lainnya	1. Penyusunan dan penetapan kebijakan tentang pola karir ASN
			2. Pelaksanaan dan penyediaan kebijakan tentang pengisian Jabatan Manajerial secara terbuka dan kompetitif serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada *talent pool* dan rencana suksesi
		5. Manajemen kinerja secara terukur melalui penetapan target, evaluasi kinerja yang obyektif, identifikasi kesenjangan kinerja dan strategi mengatasinya	1. Penyediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis
			2. Pengembangan metode penilaian kinerja yang obyektif
			3. Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja
			4. Penyediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi mewujudkan tujuan organisasi
			5. Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir
		6. Penggajian, penghargaan dan dan penegakan disiplin dan kode etik serta kode perilaku ASN	1. Pemberian tunjangan kinerja berdasarkan kelas jabatan, penilaian kinerja dan aspek objektif lainnya
			2. Pemberian penghargaan yang bersifat finansial dan non finansial kepada ASN yang berprestasi
			3. Pembinaan dan penegakkan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN
			4. Pengelolaan data pelanggaran disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN yang terintegrasi dengan *data base* kepegawaian lainnya
		7. Perlindungan ASN dan peningkatan kualitas layanan kepegawaian	1. Memperluas kebijakan perlindungan pegawai (di luar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun yang diselenggarakan secara nasional)
			2. Penyediaan fasilitas yang memudahkan ASN dalam mendapatkan layanan administrasi kepegawaian

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		8. Penyediaan sistem informasi dan digitalisasi layanan kepegawaian	1. Penyempurnaan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis *online* yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai
			2. Penerapan *e-performance*/e-kinerja yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis *online*
			3. Penggunaan *e-office* yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian
			4. Pembangunan dan penggunaan *asessment center* dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi
	2. Meningkatnya profesionalitas ASN	1. Pengembangan SDM ASN dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi atau mengirimkan peserta untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi	1. Fasilitasi pelatihan dasar (Latsar) bagi CPNS
			2. Fasilitasi pengiriman dan penyelenggaraan diklat untuk mengatasi kesenjangan
	3. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan	1. Perbaikan pelayanan yang diberikan dengan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi atas hasil survei kepuasan masyarakat	1. Penyediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang efektif dan obyektif serta administrasi keuangan yang akuntabel
			2. Penyediaan administrasi kepegawaian, administrasi umum, sarana prasarana kantor serta jasa penunjang untuk memperlancar pelaksanaan tugas

https://jdih.pemalangkab.go.id

3.5. Manajemen Risiko BKPSDM Kabupaten Pemalang

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra dilakukan pada konteks tujuan dan sasaran BKPSDM Kabupaten Pemalang, maupun sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dinilai memiliki risiko tinggi untuk dilakukan pengelolaan terhadap risikonya. Identifikasi risiko dilakukan tidak hanya pada risiko strategis dan risiko operasional, namun juga termasuk risiko lainnya seperti risiko fraud, risiko kemitraan, risiko legal, dan lainnya. Kemudian untuk rencana tindak pengendalian pada konteks tujuan dan sasaran BKPSDM Kabupaten Pemalang dituangkan dalam tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.5
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029

Tujuan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	RTP	Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
Mewujudkan Meritokrasi dalam Manajemen ASN	Nilai Penerapan Sistem Merit	Adanya ketidakpastian jalur karir PNS	12	Adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi	Adanya perubahan skema pelaksanaan *talent scouting*	Penyesuaian kembali terkait regulasi dan skema sesuai dengan kebijakan pasca Penyederhanaan Birokrasi	Kepala BKD	2026
		Gratifikasi layanan kepegawaian pusat dan daerah	12	Kebijakan Penerbitan Layanan Kepegawaian berdasarkan Instansi Pusat	Terhambatnya Layanan Kepegawaian	Koordinasi secara intensif dengan Instansi Pusat yang terkait	Kepala BKD	2026
		Integrasi sistem layanan kepegawaian pusat dan daerah	12	Antar Layanan Kepegawaian berdiri sendiri dan menjadi sistem tersendiri	Terhambatnya sinkronisasi data layanan kepegawaian	1. Integrasi sistem layanan kepegawaian 2. Road map layanan kepegawaian terintegrasi pusat dan daerah	Kepala BKD	2026
		Belum tersedianya Standar Kompetensi Jabatan di seluruh level jabatan	12	Penerbitan Standar Kompetensi Jabatan berdasarkan Biro Organisasi dan Instansi Pusat	Penerapan Manajemen Talenta ASN tidak maksimal	Koordinasi secara intensif dengan Bagian Organisasi	Kepala BKD	2026

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKPSDM Kabupaten Pemalang

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berdasarkan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Pemalang serta sasaran RPJMD, ditetapkanlah tujuan Renstra. Selanjutnya dirumuskan sasaran Renstra dalam upaya pencapaian tujuan tersebut. Agar sasaran Renstra dapat dicapai, dirumuskanlah hasil kinerja berupa *outcome* yang merupakan kinerja dari program yang selanjutnya dijabarkan dalam kinerja kegiatan dan sub kegiatan. Kerangka perumusan program/kegiatan/sub kegiatan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada gambar berikut :

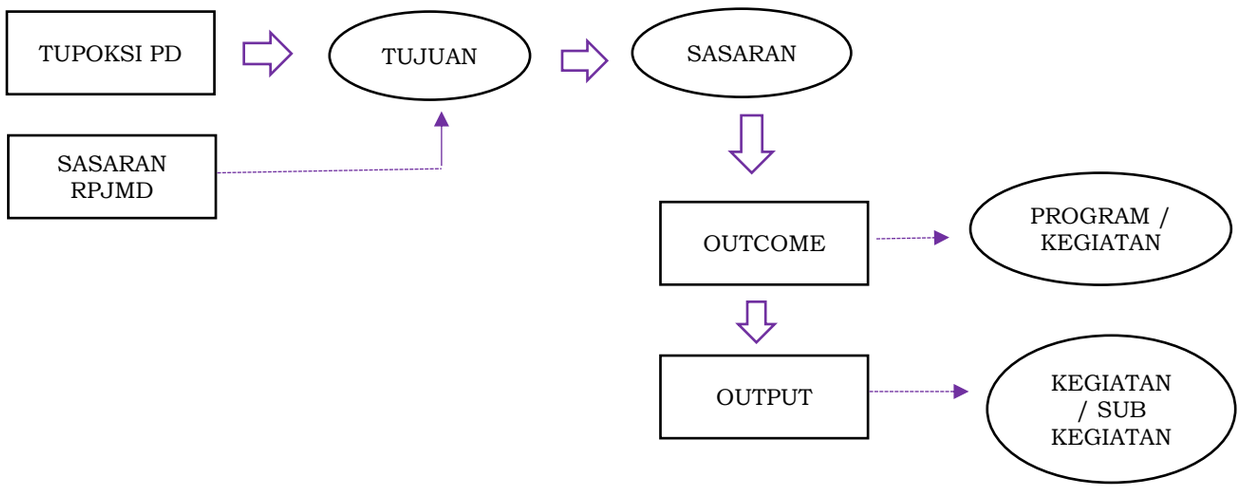

Gambar 4.1
Kerangka Penyusunan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III, BKPSDM Kabupaten Pemalang mendukung tercapainya indikator sasaran Daerah berupa maturitas SPIP melalui pencapaian tujuan mewujudkan meritokrasi dalam manajemen ASN, yaitu pengelolaan ASN didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, serta dilaksanakan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi yang diukur dengan indikator nilai penerapan sistem merit. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan mewujudkan meritokrasi dalam manajemen ASN tersebut, dirumuskan 3 (tiga) sasaran yang akan dicapai yaitu terwujudnya distribusi penempatan ASN dalam jabatan yang tepat yang diukur dengan indikator nilai aspek pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, sistem informasi; meningkatnya profesionalitas ASN yang diukur dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN); dan meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan yang diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Pencapaian sasaran terwujudnya distribusi penempatan ASN dalam jabatan yang tepat akan diupayakan melalui pelaksanaan Program Kepegawaian Daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id

yang mempunyai 6 (enam) sasaran program, berupa : (1) terpenuhinya ASN sesuai kebutuhan yang diukur dengan indikator persentase terpenuhinya ASN; (2) tercapainya distribusi penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi yang diukur dengan indikator persentase penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi; (3) meningkatnya keselarasan kualifikasi pendidikan ASN dengan jabatan yang diukur dengan indikator nilai IP ASN dimensi kualifikasi; (4) terpetakannya kompetensi ASN yang diukur dengan indikator persentase ASN yang terpetakan kompetensinya; (5) meningkatnya kualitas kinerja ASN yang diukur dengan indikator persentase ASN dengan SKP bernilai "Baik"; dan (6) meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian yang diukur dengan indikator persentase layanan administrasi kepegawaian yang efisien.

Selanjutnya pencapaian sasaran meningkatnya profesionalitas ASN akan diupayakan melalui pelaksanaan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mempunyai sasaran program meningkatnya pengembangan kompetensi ASN sesuai jabatan yang diukur dengan indikator nilai IP ASN dimensi kompetensi. Serta pencapaian sasaran meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan akan diupayakan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mempunyai sasaran program meningkatnya akuntabilitas kinerja yang diukur dengan indikator nilai SAKIP.

Pencapaian sasaran Program Kepegawaian Daerah diupayakan melalui pelaksanaan 4 (empat) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan. Pencapaian sasaran Program Pengembangan Sumber Daya Manusia diupayakan melalui pelaksanaan 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan. Pencapaian sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah diupayakan melalui pelaksanaan 8 (delapan) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan.

Selanjutnya, perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.1
Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik					Maturitas SPIP		
	1. Mewujudkan meritokrasi dalam manajemen ASN				Nilai penerapan sistem merit		
		1. Terwujudnya distribusi penempatan ASN dalam jabatan yang tepat			Nilai aspek pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, sistem informasi		
			1. Terpenuhinya ASN sesuai kebutuhan		Persentase terpenuhinya ASN	Program Kepegawaian Daerah	
			a. Tercapainya kesesuaian antara perencanaan kebutuhan dengan formasi ASN yang ditetapkan		Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				1) Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Sub kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	
				2) Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	
			2. Tercapainya distribusi penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi		Persentase penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi	Program Kepegawaian Daerah	
			a. Tersedianya talent pool untuk semua rumpun jabatan		Persentase ketersediaan talent pool untuk semua rumpun jabatan	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	
				1) Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Sub kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	
				2) Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Sub kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3. Meningkatnya keselarasan kualifikasi pendidikan ASN dengan jabatan		Nilai IP ASN Dimensi Kualifikasi	Program Kepegawaian Daerah	
			a. Meningkatnya kualifikasi pendidikan ASN		Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	
				1) Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Sub kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	
			b. Meningkatnya kompetensi pejabat fungsional		Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	
				1) Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Sub kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	
				2) Meningkatnya Karir ASN Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	
			4. Terpetakannya kompetensi ASN		Persentase ASN yang Terpetakan Kompetensinya	Program Kepegawaian Daerah	
			a. Meningkatnya penilaian kompetensi ASN		Persentase pelaksanaan penilaian kompetensi ASN	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	
				1) Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Sub kegiatan Pengelolaan Assessment Center	
			5. Meningkatnya kualitas Kinerja ASN		Persentase ASN dengan SKP Bernilai "Baik"	Program Kepegawaian Daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			a. Tercapainya penilaian dan evaluasi kinerja ASN		Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
				1) Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sub kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
			b. Terwujudnya penghargaan bagi ASN		Persentase pemberian penghargaan dan tanda jasa ASN	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
				1) Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Sub kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	
				2) Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Sub kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	
			c. Tercapainya kedisiplinan ASN		Persentase tingkat kedisiplinan ASN	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
				1) Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Sub kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	
				2) Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Sub kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	
			6. Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Efisien	Program Kepegawaian Daerah	
			a. Meningkatnya sinkronisasi data kepegawaian		Persentase data kepegawaian yang sinkron	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				1) Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sub kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	
				2) Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Sub kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	
			b. Tercapainya layanan administrasi pemberhentian yang efisien		Persentase SK pensiun yang terbit efisien	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
				1) Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	
				2) Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Sub kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	
			c. Tercapainya layanan administrasi kenaikan pangkat yang efisien		Persentase SK kenaikan pangkat yang terbit efisien	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	
				1) Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Sub kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	
			d. Tercapainya layanan administrasi izin perceraian		Persentase layanan administrasi izin perceraian	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
				1) Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Sub kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Meningkatnya Profesionalitas ASN			Indeks Profesionalitas ASN		
			1. Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN sesuai Jabatan		Nilai IP ASN dimensi kompetensi	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			a. Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis		Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	
				1) Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Sub kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				2) Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
			b. Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional		Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
				1) Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Sub kegiatan Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	
				2) Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				3) Terlaksananya Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Sub kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	
		3. Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan			Indeks Kepuasan Masyarakat		
			1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				a. Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai regulasi	Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				1) Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				2) Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				3) Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				4) Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				5) Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				6) Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Sub kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan	
				b. Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi	Jumlah Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				1) Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				2) Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				c. Tersusunnya Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai regulasi	Jumlah Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				1) Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				2) Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				d. Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				1) Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				2) Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				e. Terlaksananya penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				1) Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				2) Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				3) Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				4) Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				5) Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				6) Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				7) Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				8) Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				9) Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				f. Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				1) Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				2) Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub kegiatan Pengadaan Mebel	
				3) Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				g. Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				1) Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				2) Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				3) Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				h. Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				1) Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				2) Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel	
				3) Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				4) Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan target serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif untuk BKPSDM Kabupaten Pemalang selama tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.2

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Kode Rekening	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline				Target dan Pagu Indikatif										Ket
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	BKPSDM KABUPATEN PEMALANG																	
	Tujuan : Mewujudkan meritokrasi dalam manajemen ASN	Nilai penerapan sistem merit	Nilai	262.5	13,338,166,118	273	15,311,910,450	283.5	19,014,825,994	294	20,678,308,593	304.5	19,860,622,408	315	21,846,684,649	325.5	24,03153,114	
5.03	BIDANG URUSAN KEPEGAWAIAN																	
	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84.78	7,763,224,955	84.98	9,274,296,330	85.18	12,020,071,445	85.38	12,984,078,590	85.58	11,396,969,405	85.78	12,536,666,345	85.98	13,790,332,980	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai SAKIP	Nilai	65.66	7,763,224,955	71.41	9,274,296,330	71.61	12,020,071,445	71.81	12,984,078,590	72.01	11,396,969,405	72.21	12,536,666,345	72.41	13,790,332,980	
5.03.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi	Dokumen	9	32,381,900	13	58,092,000	40	72,895,200	40	80,184,720	40	88,203,192	40	97,023,511	41	106,725,862	
5.03.01.2.01.0001	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	32,381,900	3	10,090,000	2	11,099,000	2	12,208,900	2	13,429,790	2	14,772,769	3	16,250,046	
5.03.01.2.01.0002	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0	-	4	15,260,000	2	16,786,000	2	18,464,600	2	20,311,060	2	22,342,166	2	24,576,383	
5.03.01.2.01.0004	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0	-	4	14,760,000	2	16,236,000	2	17,859,600	2	19,645,560	2	21,610,116	2	23,771,12	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode Rekening	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline				Target dan Pagu Indikatif										Ket
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
5.03.01.2.01.0006	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Laporan	0	-	1	5,460,000	19	8,500,000	19	9,350,000	19	10,285,000	19	11,313,500	19	12,444,850	
5.03.01.2.01.0007	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	-	1	12,522,000	14	13,774,200	14	15,151,620	14	16,666,782	14	18,333,460	14	20,166,806	
5.03.01.2.01.0010	Sub kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Berita Acara	0	-	0	-	1	6,500,000	1	7,150,000	1	7,865,000	1	8,651,500	1	9,516,650	
5.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi	Laporan	0	6,228,907,144	1	6,914,324,000	2	7,379,492,000	2	8,117,441,200	2	8,929,185,320	2	9,822,103,852	2	10,804,314,237	
5.03.01.2.02.0001	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	12	6,228,907,144	12	6,910,044,000	12	7,374,784,000	12	8,112,262,400	12	8,923,488,640	12	9,815,837,504	12	10,797,421,254	
5.03.01.2.02.0005	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0	-	1	4,280,000	2	4,708,000	2	5,178,800	2	5,696,680	2	6,266,348	2	6,892,983	
5.03.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi	Dokumen	0	-	0	-	3	9,000,000	3	9,900,000	3	10,890,000	3	11,979,000	3	13,176,900	
5.03.01.2.03.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	-	0	-	1	3,000,000	1	3,300,000	1	3,630,000	1	3,993,000	1	4,392,300	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode Rekening	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline				Target dan Pagu Indikatif										Ket
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
5.03.01.2.03.0006	Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	-	0	-	2	6,000,000	2	6,600,000	2	7,260,000	2	7,986,000	2	8,784,600	
5.03.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	Kegiatan	1	91,252,500	1	99,800,000	2	115,377,750	2	126,915,525	2	139,607,078	2	153,567,785	2	168,924,564	
5.03.01.2.05.0002	Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	-	0	-	60	15,000,000	60	16,500,000	60	18,150,000	60	19,965,000	60	21,961,500	
5.03.01.2.05.0010	Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	45	91,252,500	425	99,800,000	60	100,377,750	60	110,415,525	60	121,457,078	60	133,602,785	60	146,963,064	
5.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	Kegiatan	6	575,714,785	7	562,635,180	9	729,710,895	9	802,681,985	9	882,950,183	9	971,245,201	9	1,068,369,722	
5.03.01.2.06.0001	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	14,994,000	12	20,061,000	4	22,067,100	4	24,273,810	4	26,701,191	4	29,371,310	4	32,308,441	
5.03.01.2.06.0002	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	-	0	-	4	40,000,000	4	44,000,000	4	48,400,000	4	53,240,000	4	58,564,000	
5.03.01.2.06.0004	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	160,099,544	12	168,380,800	12	185,218,880	12	203,740,768	12	224,114,845	12	246,526,329	12	271,178,962	
5.03.01.2.06.0005	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	25,749,000	2	15,022,000	2	28,323,900	2	31,156,290	2	34,271,919	2	37,699,111	2	41,469,022	
5.03.01.2.06.0006	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	13,550,000	4	20,550,000	12	22,605,000	12	24,865,500	12	27,352,050	12	30,087,255	12	33,095,981	
5.03.01.2.06.0008	Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	2,519,500	4	24,300,000	4	26,730,000	4	29,403,000	4	32,343,300	4	35,577,630	4	39,135,393	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode Rekening	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline				Target dan Pagu Indikatif										Ket
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
5.03.01.2.06.0009	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	358,802,741	12	308,791,380	12	394,683,015	12	434,151,317	12	477,566,448	12	525,323,093	12	577,855,402	
5.03.01.2.06.0010	Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	-	0	-	2	4,000,000	2	4,400,000	2	4,840,000	2	5,324,000	2	5,856,400	
5.03.01.2.06.0011	Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	-	12	5,530,000	12	6,083,000	12	6,691,300	12	7,360,430	12	8,096,473	12	8,906,120	
5.03.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Unit	13	134,529,960	45	346,917,550	212	1,430,000,000	210	1,485,000,000	15	197,982,956	15	217,781,252	15	239,559,377	
5.03.01.2.07.0001	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	-	0	-	2	80,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	
5.03.01.2.07.0005	Sub kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	-	0	-	170	350,000,000	170	385,000,000	5	50,000,000	5	55,000,000	5	60,500,000	
5.03.01.2.07.0006	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	13	134,529,960	45	346,917,550	40	1,000,000,000	40	1,100,000,000	10	147,982,956	10	162,781,252	10	179,059,377	
5.03.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan	3	299,536,716	3	311,231,000	3	342,354,100	3	376,589,510	3	414,248,461	3	455,673,307	3	501,240,638	
5.03.01.2.08.0001	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2,178,500	12	3,175,000	12	3,492,500	12	3,841,750	12	4,225,925	12	4,648,518	12	5,113,369	
5.03.01.2.08.0002	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	165,446,216	12	181,960,000	12	200,156,000	12	220,171,600	12	242,188,760	12	266,407,636	12	293,048,400	
5.03.01.2.08.0004	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	131,912,000	12	126,096,000	12	138,705,600	12	152,576,160	12	167,833,776	12	184,617,154	12	203,078,869	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode Rekening	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline				Target dan Pagu Indikatif										Ket
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
5.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Unit	147	400,901,950	86	981,296,600	103	1,941,241,500	105	1,985,365,650	105	733,902,215	105	807,292,437	105	888,021,680	
5.03.01.2.09.0001	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	36	132,812,950	36	199,440,000	36	219,384,000	38	241,322,400	38	265,454,640	38	292,000,104	38	321,200,114	
5.03.01.2.09.0005	Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	-	0	-	20	40,000,000	20	44,000,000	20	48,400,000	20	53,240,000	20	58,564,000	
5.03.01.2.09.0006	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	109	165,325,000	48	98,031,600	45	181,857,500	45	200,043,250	45	220,047,575	45	242,052,333	45	266,257,566	
5.03.01.2.09.0009	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	102,764,000	2	683,825,000	2	1,500,000,000	2	1,500,000,000	2	200,000,000	2	220,000,000	2	242,000,000	
	Sasaran 2 : Terwujudnya distribusi penempatan ASN dalam jabatan yang tepat	Nilai aspek pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, sistem informasi	Nilai	142	4,047,242,413	148	3,113,379,140	154	4,812,483,425	160	5,293,731,767	166	5,823,104,944	172	6,405,415,438	178	7,045,956,982	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				4,047,242,413		3,113,379,140		4,812,483,425		5,293,731,767		5,823,104,944		6,405,415,438		7,045,956,982	
		Persentase terpenuhinya ASN	Persen	64.51	1,244,966,047	71.31	354,331,200	74.43	1,369,462,652	77.39	1,506,408,917	80.04	1,657,049,809	82.59	1,822,754,789	85.23	2,005,030,268	
		Persentase penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi	Persen	99.06	739,107,593	99.18	957,460,880	99.31	848,356,196	99.58	933,191,815	99.67	1,026,510,997	99.75	1,129,162,096	99.81	1,242,078,306	
		Nilai IP ASN Dimensi Kualifikasi	Nilai	21.12	382,616,725	21.14	580,431,360	21.16	678,474,496	21.18	746,321,946	21.2	820,954,140	21.22	903,049,554	21.24	993,354,510	
		Persentase ASN yang Terpetakan Kompetensinya	Persen	17.19	286,682,044	18.69	300,565,960	20.19	330,622,556	21.69	363,684,812	23.19	400,053,293	24.69	440,058,622	2619	484,064,484	
		Persentase ASN dengan SKP Bernilai "Baik"	Persen	94.81	716,752,377	94.83	390,786,690	94.85	801,232,715	94.87	881,355,986	94.89	969,491,585	94.91	1,066,440,743	94.93	1,173,084,818	
		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Efisien	Persen	89.15	677,117,627	93.81	529,803,050	94.31	784,334,811	94.81	862,768,292	95.31	949,045,121	95.81	1,043,949,633	96.31	1,148,344,596	
5.03.02.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan																	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode Rekening	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline				Target dan Pagu Indikatif										Ket
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Informasi Kepegawaian ASN																	
		Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	Persen	100	1,244,966,047	100	354,331,200	100	1,369,462,652	100	1,506,408,917	100	1,657,049,809	100	1,822,754,789	100	2,005,030,268	
		Persentase data kepegawaian yang sinkron	Persen	73.25	331,974,602	75.25	291,977,400	77.25	375,650,112	79.25	413,215,123	81.25	454,536,636	83.25	499,990,299	85.25	549,989,329	
		Persentase SK pensiun yang terbit efisien	Persen	83.33	158,350,416	100	99,376,900	100	184,185,458	100	202,604,003	100	222,864,404	100	245,150,844	100	269,665,928	
5.03.02.2.01.0002	Sub kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	2	239,319,629	2	33,105,400	2	263,251,592	2	289,576,751	2	318,534,426	2	350,387,869	2	385,426,656	
5.03.02.2.01.0003	Sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	2	1,005,646,418	2	321,225,800	2	1,106,211,060	2	1,216,832,166	2	1,338,515,382	2	1,472,366,921	2	1,619,603,613	
5.03.02.2.01.0006	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	664	158,350,416	500	99,376,900	500	174,185,458	500	191,604,003	500	210,764,404	500	231,840,844	500	255,024,928	
5.03.02.2.01.0008	Sub kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	0	-	0	-	1	10,000,000	1	11,000,000	1	12,100,000	1	13,310,000	1	14,641,000	
5.03.02.2.01.0010	Sub kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	4	127,814,500	4	137,340,000	1	151,074,000	1	166,181,400	1	182,799,540	1	201,079,494	1	221,187,443	
5.03.02.2.01.0011	Sub kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	6	204,160,102	2	154,637,400	2	224,576,112	2	247,033,723	2	271,737,096	2	298,910,805	2	328,801,886	
5.03.02.2.02	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN																	
		Persentase ketersediaan talent pool untuk semua rumpun jabatan	Persen	14.00	739,107,593	14.00	957,460,880	32.00	848,356,196	50.00	933,191,815	68.00	1,026,510,997	86.00	1,129,162,096	100.00	1,242,078,306	
		Persentase SK kenaikan pangkat yang terbit efisien	Persen	100	184,190,109	100	118,548,640	100	202,609,120	100	222,870,032	100	245,157,035	100	269,672,739	100	296,640,012	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode Rekening	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline				Target dan Pagu Indikatif										Ket
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
5.03.02.2.02.0001	Sub kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	6	88,135,668	4	120,260,980	200	132,287,078	200	145,515,786	200	160,067,364	200	176,074,101	200	193,681,511	
5.03.02.2.02.0002	Sub kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	6	184,190,109	6	118,548,640	1000	202,609,120	1000	222,870,032	1000	245,157,035	1000	269,672,739	1000	296,640,012	
5.03.02.2.02.0003	Sub kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	5	650,971,925	2	837,199,900	4	716,069,118	4	787,676,029	4	866,443,632	4	953,087,995	4	1,048,396,795	
5.03.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN																	
		Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar	Persen	44.89	306,413,665	45.29	487,368,260	45.69	536,105,086	46.09	589,715,595	46.49	648,687,154	46.89	713,555,869	47.29	784,911,456	
		Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi	Persen	22.94	76,203,060	23.44	93,063,100	23.94	142,369,410	24.44	156,606,351	24.94	172,266,986	25.44	189,493,685	25.94	208,443,053	
		Persentase pelaksanaan penilaian kompetensi ASN	Persen	100	286,682,044	100	300,565,960	100	330,622,556	100	363,684,812	100	400,053,293	100	440,058,622	100	484,064,484	
5.03.02.2.03.0002	Sub kegiatan Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	250	286,682,044	250	300,565,960	250	330,622,556	250	363,684,812	250	400,053,293	250	440,058,622	250	484,064,484	
5.03.02.2.03.0004	Sub kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	149	306,413,665	100	487,368,260	100	536,105,086	100	589,715,595	100	648,687,154	100	713,555,869	100	784,911,456	
5.03.02.2.03.0013	Sub kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Orang	152	47,619,460	80	93,063,100	80	102,369,410	80	112,606,351	80	123,866,986	80	136,253,685	80	149,879,053	
5.03.02.2.03.0014	Sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	50	28,583,600	0	-	5	40,000,000	5	44,000,000	5	48,400,000	5	53,240,000	5	58,564,000	
5.03.02.2.04	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																	
		Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi	Persen	98.4	226,969,687	98.5	109,388,700	98.6	249,666,656	98.7	274,633,321	98.8	302,096,653	98.9	332,306,319	99	365,536,951	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode Rekening	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline				Target dan Pagu Indikatif										Ket
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase pemberian penghargaan dan tanda jasa ASN	Persen	19.81	196,289,486	19.25	165,646,970	19.25	228,723,535	19.25	251,595,888	19.25	276,755,477	19.25	304,431,025	19.25	334,874,127	
		Persentase tingkat kedisiplinan ASN	Persen	99.90	293,493,204	99.90	115,751,020	99.90	322,842,524	99.90	355,126,777	99.90	390,639,455	99.90	429,703,400	99.90	472,673,740	
		Persentase layanan administrasi izin perceraian	Persen	100	2,602,500	100	19,900,110	100	21,890,121	100	24,079,133	100	26,487,046	100	29,135,751	100	32,049,326	
5.03.02.2.04.0002	Sub kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	4	226,969,687	4	109,388,700	4	249,666,656	4	274,633,321	4	302,096,653	4	332,306,319	4	365,536,951	
5.03.02.2.04.0004	Sub kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	2306	189,448,986	2231	147,165,470	2231	208,393,885	2231	229,233,273	2231	252,156,600	2231	277,372,260	2231	305,109,486	
5.03.02.2.04.0005	Sub kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	0	6,840,500	10	18,481,500	10	20,329,650	10	22,362,615	10	24,598,877	10	27,058,764	10	29,764,641	
5.03.02.2.04.0007	Sub kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	39	259,686,704	400	86,485,820	120	285,655,374	120	314,220,912	120	345,643,003	120	380,207,303	120	418,228,034	
5.03.02.2.04.0008	Sub kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	12	33,806,500	12	29,265,200	12	37,187,150	12	40,905,865	12	44,996,452	12	49,496,097	12	54,445,706	
5.03.02.2.04.0009	Sub kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	23	2,602,500	10	19,900,110	10	21,890,121	10	24,079,133	10	26,487,046	10	29,135,751	10	32,049,326	
	Sasaran 3 : Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	78.28	1,527,698,750	78.3	2,924,234,980	78.32	2,182,271,124	78.34	2,400,498,236	78.36	2,640,548,060	78.38	2,904,602,866	78.4	3,195,063,153	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai IP ASN dimensi kompetensi	Nilai	27.2	1,527,698,750	27.4	2,924,234,980	27.6	2,182,271,124	27.8	2,400,498,236	28	2,640,548,060	28.2	2,904,602,866	28.4	3,195,063,153	
5.04.02.2.01	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	Persen	78.48	1,243,815,910	78.65	1,079,072,000	78.83	630,000,000	79.00	693,000,000	79.17	762,300,000	79.34	838,530,000	79.51	922,383,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode Rekening	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline				Target dan Pagu Indikatif										Ket
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
5.04.02.2.01.0001	Sub kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen	0	-	0	-	1	30,000,000	1	33,000,000	1	36,300,000	1	39,930,000	1	43,923,000	
5.04.02.2.01.0003	Sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	9137	1,243,815,910	20	1,079,072,000	20	600,000,000	20	660,000,000	20	726,000,000	20	798,600,000	20	878,460,000	
5.04.02.2.02	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	Persen	0	283,882,840	2.62	1,845,162,980	3.05	1,552,271,124	3.48	1,707,498,236	3.91	1,878,248,060	4.34	2,066,072,866	4.77	2,272,680,153	
5.04.02.2.02.0005	Sub kegiatan Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Dokumen	3	283,882,840	3	129,089,520	2	312,271,124	2	343,498,236	2	377,848,060	2	415,632,866	2	457,196,153	
5.04.02.2.02.0007	Sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	0	-	305	1,716,073,460	50	1,200,000,000	50	1,320,000,000	50	1,452,000,000	50	1,597,200,000	50	1,756,920,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode Rekening	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline				Target dan Pagu Indikatif										Ket
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
5.04.02.2.02.0008	Sub kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Dokumen	0	-	0	-	1	40,000,000	1	44,000,000	1	48,400,000	1	53,240,000	1	58,564,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dukungan BKPSDM Kabupaten Pemalang terhadap program prioritas Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik	Mewujudkan meritokrasi dalam manajemen ASN	1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	
			2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	
			3. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	
			4. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	
			5. Pengelolaan Data Kepegawaian	
			6. Pengelolaan Mutasi ASN	
			7. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	
			8. Pengelolaan Promosi ASN	
			9. Pengelolaan Assessment Center	
			10. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	
			11. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	
			12. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
			13. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	
			14. Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	
			15. Pembinaan Disiplin ASN	
			16. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	
			17. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
			18. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
			19. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	
			20. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable)* mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kabupaten Pemalang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Pemalang yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.4
Penetapan Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kabupaten Pemalang	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra		Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Nilai Penerapan Sistem Merit	Nilai	238,5	262,5	273,0	283,5	294,0	304,5	315,0	325,5	325,5
2	Nilai aspek pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, sistem informasi	Nilai	127	142	148	154	160	166	172	178	178
3	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	65,53	78,28	78,3	78,32	78,34	78,36	78,38	78,4	78,4
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83,25	84,78	84,98	85,18	85,38	85,58	85,78	85,98	85,98

4.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Selain IKU, terdapat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atau Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.5
Penetapan Indikator Kinerja Kunci BKPSDM Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Kunci BKPSDM Kabupaten Pemalang	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra		Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	64,62	44,89	45,29	45,69	46,09	46,49	46,89	47,29	47,29
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	3,68	13,67	14,17	14,67	15,17	15,67	16,17	16,67	16,67
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	12,34	22,94	23,44	23,94	24,44	24,94	25,44	25,94	25,94

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB VIII
PENUTUP

Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025 2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja, serta menjadi pedoman dasar dalam evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja tahunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini telah melalui proses diantaranya identifikasi permasalahan dan perumusan isu strategis, FGD internal dan eksternal, Forum Perangkat Daerah, verifikasi rancangan dengan Bappeda, reviu Inspektorat, serta verifikasi akhir dengan Bappeda. Saran dan masukan tetap diharapkan untuk perbaikan Renstra ke depan, sehingga manfaatnya tidak hanya dapat dirasakan oleh aparatur Pemerintah Kabupaten Pemalang saja, namun juga *stakeholder* terkait dan masyarakat selaku penerima pelayanan publik.

Renstra menjadi pedoman bagi seluruh Unit Kerja di Lingkungan BKPSDM Kabupaten Pemalang selama 5 (lima) tahun kedepan. Seluruh sekretariat, bidang dan UPT BKPSDM Kabupaten Pemalang berkewajiban mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. BKPSDM Kabupaten Pemalang berkewajiban untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Renstra Tahun 2025 2029 dengan sebaik-baiknya sehingga indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai;
2. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Tahun 2025 2029, BKPSDM Kabupaten Pemalang melalui Sekretariat, Bidang dan UPT diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan;
3. Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja 5 (lima) tahun, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari upaya mendukung RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSDM Provinsi Kabupaten Pemalang.

Adapun rencana tindak lanjut sebagai fokus kegiatan yang akan dilakukan BKPSDM Kabupaten Pemalamh selama periode tahun 2025 2029 antara lain :

1. Pemenuhan ASN sesuai kebutuhan;
2. Distribusi ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi;
3. Peningkatan kompetensi melalui jalur pendidikan formal dan pelatihan;
4. Penilaian potensi dan kompetensi secara reguler;
5. Implementasi penilaian kinerja ASN untuk mendukung kinerja organisasi dan sebagai dasar dalam pengembangan karir;
6. Peningkatan kualitas sistem informasi dan digitalisasi layanan kepegawaian terintegrasi.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan komitmen, dukungan, kesungguhan, tanggungjawab serta kerjasama yang erat dari seluruh pemangku kepentingan yang terkait di Kabupaten Pemalang untuk terwujudnya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra ini, mendukung tercapainya visi **"PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA"**.

Pemalang, September 2025
Kepala BKPSDM Kabupaten Pemalang

EKO ADI SANTOSO, S.H.,M.Kn
Pembina Utama Muda
NIP. 19680908 199803 1 003

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATARBELAKANG

Dari Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI, BNPB) dan juga dari data pusdalops BPBD Kabupaten Pemalang, bencana yang termasuk sering terjadi di Kabupaten Pemalang yaitu tanah longsor, puting beliung, banjir, dan kekeringan. Kejadian bencana tersebut menimbulkan dampak korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan/lahan yang besar, serta menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat Kabupaten Pemalang. Sepanjang tahun 2012-2023 Kabupaten Pemalang didominasi oleh bencana hidrometeorologi dengan jumlah kejadian 1.161 meliputi kejadian banjir, banjir bandang, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan kekeringan. Kejadian bencana ini telah korban jiwa dan kerugian secara material.

Secara kondisi topografi Kabupaten Pemalang yang terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi, maka jenis bencana yang terjadi juga semakin kompleks. Daerah dataran rendah (wilayah bagian utara) didominasi oleh rawan bencana banjir/banjir bandang, angin putting beliung. Sedangkan untuk daerah dataran tinggi (wilayah bagian Selatan) didominasi oleh rawan bencana tanah longsor dan kekeringan.

Dengan adanya potensi bencana yang ada di Kabupaten Pemalang tersebut maka perencanaan mitigasi bencana menjadi sangat penting untuk masuk kedalam dokumen Renstra BPBD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, sebagai upaya mengurangi risiko bencana.

Rencana Strategis BPBD Kabupaten Pemalang merupakan dokumen resmi yang disusun oleh BPBD Kabupaten Pemalang yang memuat rencana program, kegiatan dan sub-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan daerah selama 5 (lima) tahun, serta merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang. Upaya tersebut diwujudkan dengan pentahapan capaian pertahun melalui Renja Perangkat Daerah, sehingga kinerja terukur secara periodik, dievaluasi serta dapat dilakukan perbaikan dalam pencapaian tujuan akhir.

Adapun keterkaitan antara dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sektor lainnya dapat digambarkan sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

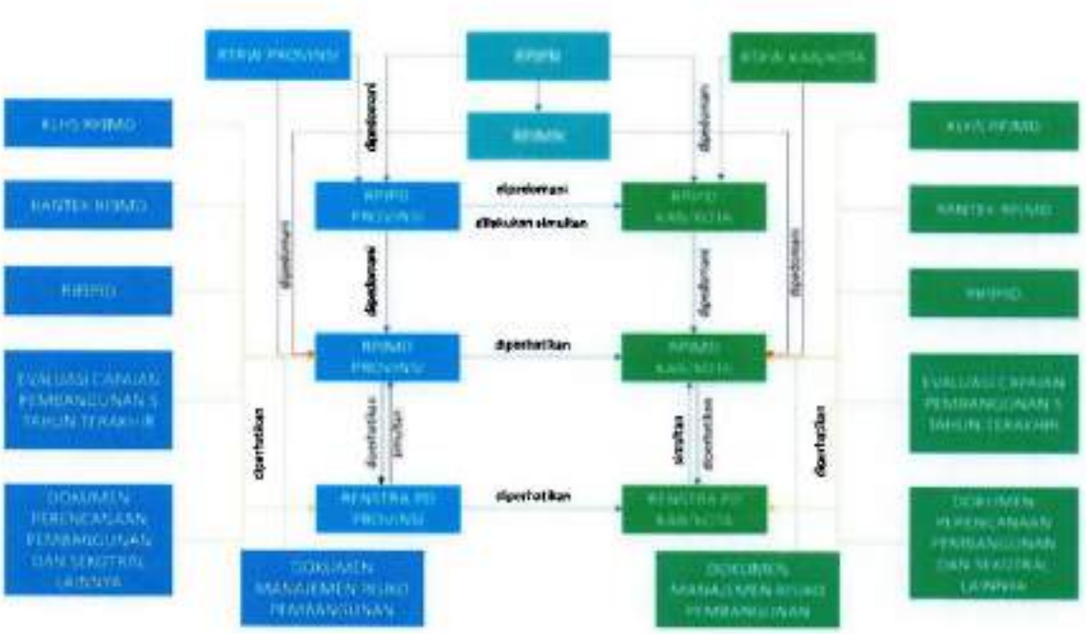

Gambar 1.1. Keterkaitan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya

Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 dan pedoman teknis penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

Renstra BPBD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 -2029 disusun dengan menganalisa hasil capaian kinerja renstra periode sebelumnya dan disesuaikan dengan kondisi terkini tentang potensi, peluang, dan tantangan dan permasalahan yang sedang dihadapi dengan disesuaikan pada Visi dan Misi Bupati terpilih, serta selaras dengan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah, serta hasil kepakatan Forum Perangkat Daerah penyusunan rencana Strategis

Renstra BPBD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 merupakan bentuk komitmen seluruh komponen BPBD Kabupaten Pemalang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Pemalang sekaligus wujud dan peran serta BPBD Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029. Dokumen Renstra BPBD Kabupaten Pemalang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan baik dalam perencanaan, penganggaran, pengawasan serta evaluasi kinerja

https://jdih.pemalangkab.go.id

1.2. DASAR HUKUM

Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang disusun berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);;
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran

https://jdih.pemalangkab.go.id

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sDaerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029.
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ….Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor….);

https://jdih.pemalangkab.go.id

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor ... Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor ...);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
29. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis BPBD Kabupaten Pemalang 2025 – 2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu 5 tahun,

a. Sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 sesuai tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Pemalang
b. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Pemalang selama kurun waktu 5 tahun (2025 – 2029)

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis BPBD Kabupaten Pemalang ini adalah sebagai berikut :

a. Sebagai pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam jangka 5 (lima) tahun yaitu tahun 2025 - 2029;
b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) terkait konsistensi antara perancanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pada BPBD Kabupaten Pemalang;
c. Sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja BPBD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029

https://jdih.pemalangkab.go.id

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra BPBD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN.

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan renstra BPPD.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

Bab ini memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur BPBD, sumber daya yang dimiliki BPBD, capaian kinerja pelayanan BPBD pada renstra periode sebelumnya, mengulas kelompok sasaran layanan. Bab ini memuat juga permasalahan pelayanan BPBD dan isu strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

Bab ini memuat tujuan Renstra BPBD Kabupaten Pemalang tahun 2025 – 2029, sasaran Renstra BPBD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 serta strategi dan arah kebijakan BPBD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra BPBD tahun 2025 – 2029.

Bab IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Pada bagian ini diuraikan tentang uraian program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja indikator, target dan pagu indikatif dan sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah. Serta memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra BPBD tahun 2025 – 2029 melalui indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2.1. GAMBARAN PELAYANAN BPBD

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur BPBD

Dalam rangka memudahkan pemahaman terhadap isi dan muatan dari gambaran umum kewenangan BPBD Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang serta Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organsisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana yang menjadi kewenangan daerah.

A. Tugas dan Fungsi

Tugas

BPBD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

Fungsi

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 82 Tahun 2021 tentang Susunan Organsiai Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang terdiri atas :

1. Kepala Badan
2. Unsur Pengarah
3. Unsur Pelaksana yang terdiri dari :
   a. Kepala Pelaksana
   b. Sekretariat, terdiri dari :
      1) Subbagian Bina Progam dan Keuangan;
      2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari kelompok jabatan fungsional:

https://jdih.pemalangkab.go.id

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari kelompok jabatan fungsional:
e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari kelompok jabatan fungsional:
f. UPTD

Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut :

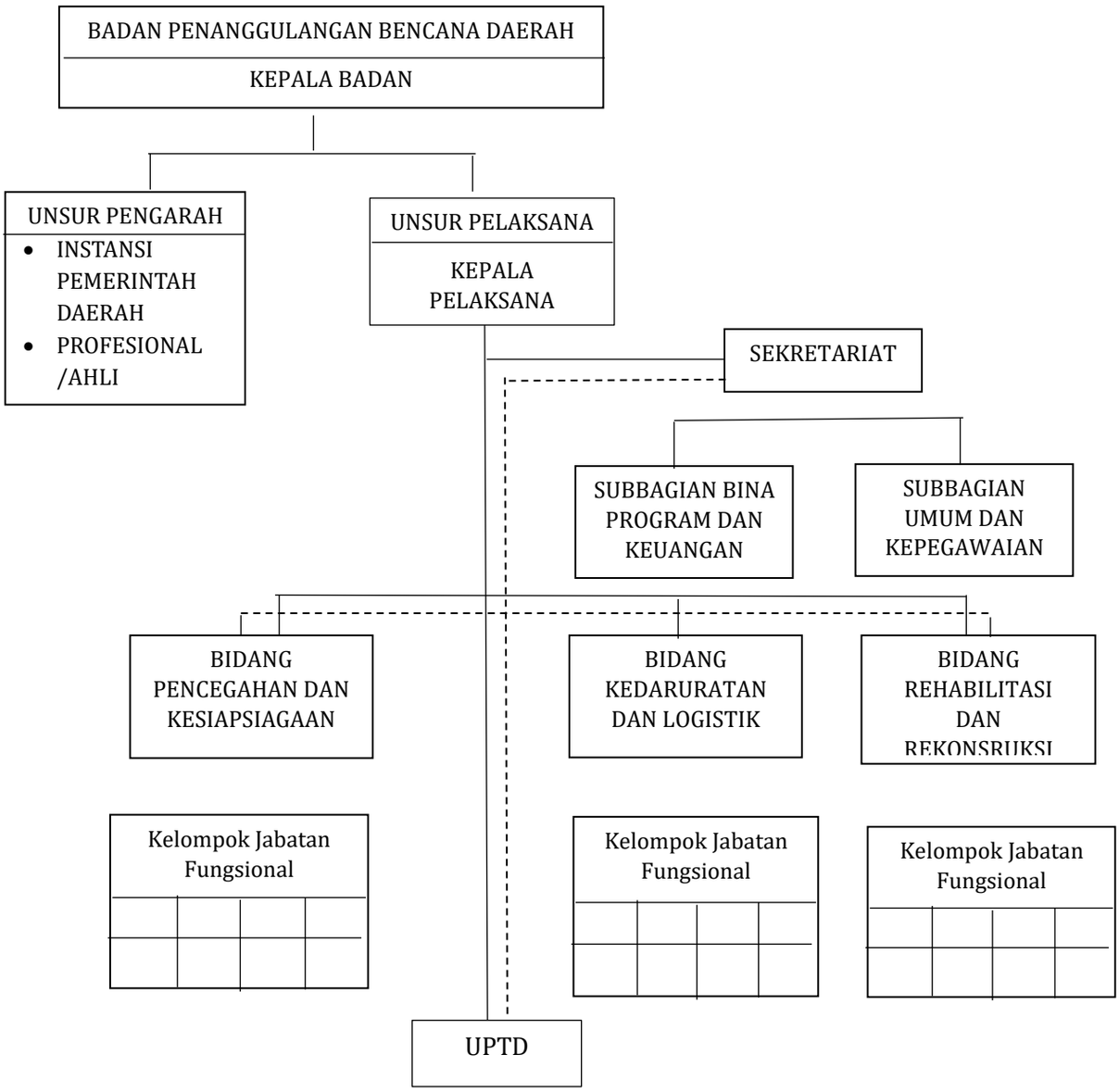

Keterangan :

———— : Garis Hirarki
---------- : Garis Koordinasi

Gambar 2.1.
Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

Rincian tugas, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural pada BPBD Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

A. Tugas dan Fungsi

Kepala BPBD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala BPBD menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi,
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi,
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi,
d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Uraian Tugas

Kepala BPBD mempunyai uraian tugas menetapkan kebijakan penanggulangan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana secara terintegrasi.

2) Unsur Pengarah

A. Tugas dan Fungsi

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, unsur pengarah menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah,
b. Pemantauan, dan
c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

B. Uraian Tugas

Unsur pengarah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun prosedur tetap bersama unsur pelaksana mengenai penanganan bencana clan peta rawan bencana;
b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
c. Melaksanakan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama unsur pelaksana sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses penanggulangan bencana;

https://jdih.pemalangkab.go.id

d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.
e. Memberikan masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
f. Memberikan masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta penanganan pengungsi; dan
g. Memberikan masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana

3) Kepala Pelaksana

A. Tugas

Kepala Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi

B. Uraian Tugas

Kepala Pelaksana mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
b. Merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
c. Merurnuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana;
d. Mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana;
e. Mengoordinasikan pengerahan sumber daya rnanusia, peralatan, logistic dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan;
f. Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana sesuai kebutuhan pelayanan publik
g. Mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana sesuai dengan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemcrintah (SPIP);
h. Mengarahkan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang ketentraman dan ketertiban

https://jdih.pemalangkab.go.id

umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana;

i. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana ;
j. Merumuskan laporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana;
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

4) Sekretaris

A. Tugas dan Fungsi

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPBD

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan BPBD;
b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan BPBD;
c. Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan BPBD;
d. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan BPBD;
e. Penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pcngendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
f. Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BPBD;
g. Penyiapan evaluasi dan pelaporan dj lingkungan BPBD; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Uraian Tugas

Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan;
b. Mengoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan, Anggaran (DPA);
c. Menyusun rancangan kebijakan kesekretar:iatan;
d. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengelolaan dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kedinasan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kerjasama, kehumasan, kearsipan, dokumentasi dan pengadaan barang / jasa.
e. Menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian;
f. Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik;
g. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta

https://jdih.pemalangkab.go.id

perlindungan masyarakat sub urusan bencana sesuai dengan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

h. Menyusun konsep inovasi kesekretariatan;
i. Mengoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang-bidang;
j. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan;
k. Mengoordinasikan penyusunan laporan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana daerah;
l. Melaksanakan tugas kcdinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

4.1. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

A. Tugas

Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program dan keuangan

B. Uraian Tugas

Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Merencanakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan dokumen perencanaan;
- Menyusun usulan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta dokumen perencanaan lainnya;
- Melaksanakan pengelolaan administrasi bina program dan keuangan;
- Mengelola data urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana
- Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran
- Menyusun konsep dokumen pertanggungjawaban kinerja yang meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dokumen pertanggungjawaban lainnya;
- Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LE), Neraca dan catatan atas laporan keuangan (CaLK) serta laporan keuangan lainnya;
- Menyiapkan bahan inovasi Subbagian Bina Program dan Keuangan;
- Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana sesuai dengan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Bina Program dan Keuangan;
- Menyusun bahan laporan penunjang urusan pemerintahan bidang

https://jdih.pemalangkab.go.id

ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas subbagian Bina Program dan Keuangan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

4.2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

A. Tugas

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

B. Uraian Tugas

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut ;
- Merencanakan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- Mengelola administrasi barang milik daerah meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pengamanan ,pembinaan, pengawasan, pengendalian, penatausahaan, pemanfaatan dan penyusunan laporan barang milik daerah
- Mengelola administrasi umum meliputi surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan;
- Mengelola administrasi kehumasan meliputi keprotokolan dan informasi publik;
- Mengelola administrasi kerumahtanggaan meliputi pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan, penataan ruang kantor pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor, fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas;
- Mengelola administrasi kepegawaian;
- Mengelola ketatalaksanan meliputi penyusunan sistem dan prosedur kerja
- Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik
- Menyiapkan bahan inovasi Subbagian Umum dan Kepegawaian
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

5) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan .

A. Tugas dan Fungsi

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan bidang kesiapsiagaan

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pencegahan dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan bidang kesiapsiagaan; dan
2. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya

B. Uraian Tugas

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- Merencanakan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan dokumen perencanaan;
- Menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- Merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- Menyelenggarakan fasilitasi pencegahan bencana yang meliputi penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pencegahan dan mitigasi pada pra bencana, penyusunan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana, sosialisasi, bimbingan, dan pembinaan dalam rangka pengembangan budaya sadar bencana, dan koordinasi dan konsultasi terkait pencegahan bencana.
- Menyelenggarakan fasilitasi kesiapsiagaan pada pra bencana yang meliputi penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan kesiapsiagaan pada pra bencana, bimbingan teknis dan pelatihan penanggulangan bencana berdasarkan analisa kebutuhan, penyusunan perencanaan penanggulangan melalui pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan kebijakan teknis kesiapsiagaan melalui pemberdayaan masyarakat pra bencana, pengorganisasian pemasangan rambu dan jalur evakuasi serta pengujian sistem peringatan dini (early warning system) secara efektif: pemantauan daerah rawan bencana secara berkala meliputi identifikasi, pengenalan, dan pengkajian terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana, serta pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait kegiatan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
- Menyusun konsep inovasi pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

https://jdih.pemalangkab.go.id

6) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

A. Tugas dan Fungsi

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan serta bidang logistik dan peralatan

Dalam melaksanakan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan serta bidang logistik dan peralatan; dan
2. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Uraian Tugas

Kepala Bidang Kedaruratan dan logistik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- Merencanakan program dan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan dokumen perencanaan;
- Menyusun rancangan kebijakan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- Menyelenggarakan fasilitasi tanggap darurat yang meliputi penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kegiatan tanggap darurat dan penanganan pengungsi, pelaksanaan kebijakan operasional teknis penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi, pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait pada saat penanganan tanggap darurat, koordinasi dan konsultasi, pelatihan petugas operasional tanggap darurat secara berkala dalam usaha pemeliharaan ketrampilan dan peningkatan mutu kinerja operasional, identifikasi dan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap cakupan lokasi bencana, jumlah korban dan kerusakan sarana prasarana, identifikasi gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan dan kemampuan sumber daya alam maupun buatan pada saat terjadi bencana, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi.
- Menyelenggarakan fasilitasi penyediaan dukungan logistik dan peralatan yang meliputi penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kegiatan penyediaan dukungan logistik dan peralatan, pelaksanaan kebijakan operasional teknis penyediaan dukungan logistik dan peralatan pada saat tanggap darurat, pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait pada saat penyediaan dukungan logistik dan peralatan, pengelolaan sarana operasional penanganan bencana serta menginformasikan kondisi peralatan teknis operasional secara berkala, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban bencana, bimbingan teknis manajemen logistik dan peralatan sesuai analisis kebutuhan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyediaan

https://jdih.pemalangkab.go.id

ukungan logistik dan peralatan pada saat penanganan bencana,
- Menyusun konsep inovasi Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Kedaruratan dan logistik;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Kedaruratan dan Logistik
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

7) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi

A. Tugas dan Fungsi

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan bidang rekontruksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi serta bidang rekontruksi; dan
2. Pelaksanaan fungsi jain yang diberikan oleh kepala pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya

B. Uraian tugas

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai uraian tugas sebagai berikut

- Merencanakan program dan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan dokumen perencanaan
- Menyusun rancangan kebijakan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- Menyelenggarakan fasilitasi rehabilitasi pada pasca bencana yang meliputi penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kegiatan rehabilitasi, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis kegiatan Rehabilitasi pada pasca bencana, pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait pada pasca bencana, pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, serta fasilitasi dan koordinasi terkait pelaksanaan perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum serta rumah masyarakat terdampak pasca bencana secara terpadu.
- Menyelenggarakan fasilitasi rekonstruksi pada pasca bencana yang meliputi koordinasi dengan instansi terkait sesuai prosedur dan ketentuan, fasilitasi peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, fungsi pelayanan publik, dan pelayanan utama dalam Masyarakat terdampak bencana, pelaksanaan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, rekonsiliasi dan resolusi di daerah bencana yang diakibatkan oleh konflik secara terpadu, serta pemantauan,

https://jdih.pemalangkab.go.id

evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rekonstruksi pada pasca bencana.

- Menyusun konsep inovasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

8) UPTD
UPTD dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu pada BPBD.

9) Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
Tugas, klasifikasi, kategori, jenjang, pembinaan dan pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

2.1.2. Sumber Daya BPBD

A. Sumber Daya Manusia

Dalam upaya melaksanakan pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat, BPBD Kabupaten Pemalang didukung dengan sumber daya manusia sejumlah 58 personil, yang terdiri atas ASN/PNS sejumlah 28 orang (48%), non ASN sejumlah 30 orang (52%).

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa jumlah ASN dibandingkan dengan seluruh pegawai di BPBD Kabupaten Pemalang hanya sebesar 48% dari jumlah keseluruhan yaitu 58 orang pegawai yang ada . Kekurangan pegawai yang terjadi selama ini ditutup dengan menggunakan tenaga honorer.
Berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan, sumber daya manusia pada BPBD Kabupaten Pemalang tergambar sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai BPBD Berdasarkan Golongan dan Jabatan

No	Golongan	Jabatan	Jumlah Pegawai	Pendidikan Akhir
1	IV C	Kepala Pelaksana	1	S-2 (Magister Ekonomi Pembangunan)
2	IV A	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1	S-2 (Magister Manajemen)
3	IV A	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	1	S-2 (Teknik Sipil)

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Golongan	Jabatan	Jumlah Pegawai	Pendidikan Akhir
4	IV A	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1	S-2 (Teknik Sipil)
5	IV A	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	1	S-1 (Manajemen)
6	III D	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	1	S-1 (Administrasi Negara)
7	III D	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	1	S-1 (Ilmu Pemerintahan)
8	III D	Sekretaris	1	D-IV STPDN
9	III D	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	1	S-2 (Geoinformasi – Perencanaan Spasial dan Manajemen Bencana)
10	III C	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan	1	S-1 (Ekonomi Manajemen)
11	III C	Pengolah data dan informasi	1	S-1 (Ilmu Pemerintahan)
12	III B	Penelaah Teknis Kebijakan	2	S-1(Teknik Geologi dan Sosiologi)
13	III A	Penelaah Teknis Kebijakan	2	SMA/SMK (Biologi)
14	III A	Pengadministrasi Perkantoran	1	SMA (IPS)
15	III A	Analis Kebencanaan Ahli Pertama	2	S-1 (Manajemen)
16	II D	Pengadministrasi Perkantoran	1	SMK I(Teknik Agronomi)
17	II C	Pengadministrasi Perkantoran	1	SMA (paket C)
18	II C	Penelaah Teknis Kebijakan	1	Paket C
19	II C	Operator layanan operasional 3	2	Paket C
20	II C	Pengolah data dan informasi	1	Paket C
21	II C	Pranata Komputer Trampil	1	D-III (Sistem Informasi)
22	II B	Operator layanan operasional 3	1	SMA Paket C
23	II A	Operator layanan operasional 3	1	SMA Paket C
24	II A	Operator layanan operasional 1	1	SD

Sumber : BPBD Kabupaten Pemalang, 2025

Tabel 2.2. Rekapitulasi Jumlah Pegawai BPBD Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

GOLONGAN	TINGKAT PENDIDIKAN					
	S2	S1	D-III	SMA	SMP	SD
II A	-	-	-	1	-	1
II B	-	-	-	1	-	-
II C	-	-	1	5	-	-
II D	-	-	-	1	-	-
III A	-	2	-	3	-	-
III B	-	2	-	-	-	-
III C	-	2	-	-	-	-
III D	1	3	-	-	-	-
IV A	3	1	-	-	-	-
IV C	1	-	-	-	-	-
Total	**5**	**10**	**1**	**11**	**0**	**1**

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sumber : BPBD Kabupaten Pemalang, 2025

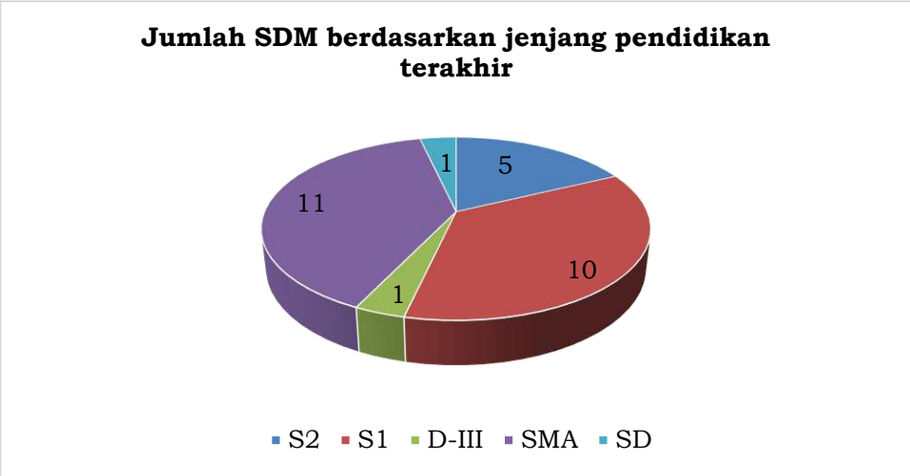

Gambar 2.2. Grafik Jumlah SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa komposisi ASN yang ada di lingkungan BPBD Kabupaten Pemalang didominasi oleh lulusan S-1 sebesar 35,71%, (10 orang), selanjutnya jenjang S2 sebesar 17,86% (5 orang). Untuk Diploma III sebanyak 3.57% (1 orang), dan sisanya SMA 39,29% (11 orang) dan SD sebesar 3,57% (1 orang).

Dari hasil analisis sumber daya manusia di BPBD Kabupaten Pemalang, jika dilihat kualitas (jenjang pendidikan terakhir) sudah mencukupi kebutuhan dengan dominasi jenjang sarjana S-1, walaupun masih ada jenjang setingkat SD dengan jumlah sebanyak 1 orang (3,45%). Sedangkan jika berdasarkan jenis kelamin, jumlah personil BPBD didominasi oleh pegawai laki – laki, yaitu sebesar 75,86% (44 orang) dari jumlah personil keseluruhan dan untuk jumlah pegawai perempuan sebesar 24,14% (14 orang).

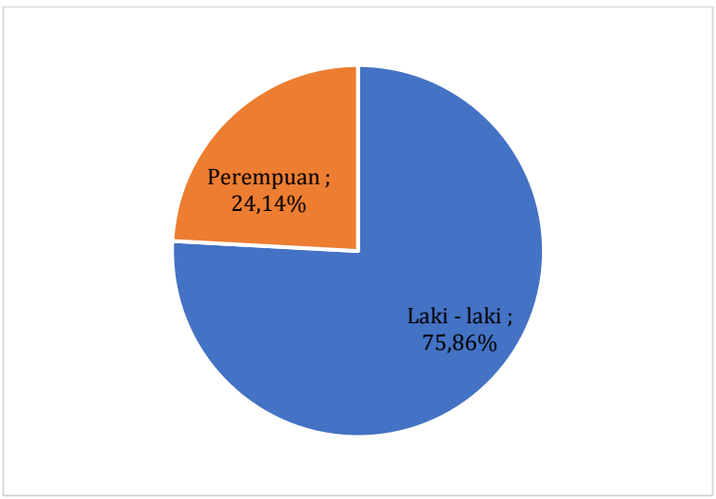

Gambar 2.3. Persentase Jumlah Personil berdasarkan Jenis Kelamin BPBD Kabupaten Pemalang Tahun 2025

B. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang telah dilengkapi dengan gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat.

Sarana dan Prasarana yang dimiliki/dipergunakan oleh BPBD Kabupaten Pemalang untuk mendukung pelaksanaan tugas pelayanan penanggulangan bencana, sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.3. Sarana Prasarana BPBD Kabupaten Pemalang

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Merk/Type	Tahun Pembelian	Kondisi Barang		
						B	RR	RB
1	2	5	6	7	8	9	10	11
1	Sepeda Motor	18	Unit	Yamaha/5 LM	2003	B	-	-
2	Truck	5	Unit	Hino 130 MD	2007	B	-	-
3	Mobil Carry	3	Unit	Suzuki	2013	B	-	-
4	Mobil Ranger	1	Unit	Ford	2013	B	-	-
5	Perahu Karet	4	Unit	-	2013	B	-	-
6	Jeep	1	Unit	Toyata/ Hilux	2014	B	-	-
7	Station Wagon	1	Unit	Toyota/ Avanza	2020	B	-	-
8	Mobil Avanza All New	3	Unit		2024	B	-	-
9	Perahu Polyethilen	2	Unit	-	2014	B	-	-
10	Perahu Rafting	1	Unit	-	2013	B	-	-
11	Mesin Perahu 18 PK	2	Unit	-	2015	B	-	-
12	Mesin Perahu 9,8 PK	2	Unit	-	2014	B	-	-
13	Perahu Lipat	1	Unit	-	2013	B	-	-
14	Chain Saw	7	Unit	-	2013	B	-	-
15	Pompa Perahu	3	Unit	-	2013	B	-	-
16	Rak Tempat Perahu Karet	4	Unit	-	2020	B	-	-
17	Sandaran Mesin Tempel	3	Unit	-	2015	B	-	-
18	Dayung	18	Unit	-	2013	B	-	-
19	Velbed	3	Unit	-	2013	B	-	-
20	Genset 5,5 KVS	2	Unit	-	2013	B	-	-
21	Mesin Pompa Air	5	Unit	-	2013	B	-	-
22	Dapur Umum	2	Unit	-	2020	B	-	-
23	Mesin Perahu 25 PK	1	Unit	-	2022	B	-	-
24	Cainsaw	4	Unit	-	2023	B	-	-
25	Pompa Air (alcon)	3	Unit	-	2023	B	-	-
26	Pompa Air Mobile	1	Unit	-	2023	B	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Merk/Type	Tahun Pembelian	Kondisi Barang		
						B	RR	RB
1	2	5	6	7	8	9	10	11
27	LCD Proyektor	2	Unit	-	2020	B	-	-
28	A.C Split	15	Unit	-	2020	B	-	-
29	Camera Digital	1	Unit	Nikon/mirollers	2020	B	-	-
30	Laptop	14	Unit	-	-	B	-	-
31	Printer	13	Unit	-	-	B	-	-
32	EWS (Early Warning System)	6	Unit	-	2020	B	-	-
33	Megahpone	3	Unit	-	2020	B	-	-
34	Note Book	1	Unit	Asuz	2022	B	-	-
35	Scanner	2	Unit	Canon	2022	B	-	-

Sumber : BPBD Kabupaten Pemalang, 2025

Beberapa hal yang masih perlu mendapatkan perhatian dalam upaya penambahan dan pergantian berbagai sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas secara garis besar meliputi penyediaan alat peralatan yang refresentatif diantara alat berat (excavator), drone, GPS, altimeter, HT/*handy talky* dan perahu PVC.

Selain itu penyediaan peralatan penunjang kantor seperti perangkat komputer, penambahan meubelier seperti lemari arsip, meja kerja, kursi kerja dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang di anggap perlu sebagai penunjang terlaksananya pelayanan yang prima kepada masyarakat.

2.1.3. Kinerja Pelayanan BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang dituntut untuk terus berkarya sesuai peran dan fungsi yang diamanatkan. Dengan demikian, diharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja agar terwujud upaya dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana adalah satu perangkat Pemerintah Kabupaten Pemalang dan bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat akan tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), maupun pada saat bencana dan setelah bencana (pasca bencana) itu sendiri

Berdasarkan Permendagri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, BPBD Kabupaten Pemalang sebagai Perangkat Daerah yang mengampu urusan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pemalang, mengupayakan pencapaian SPM mulai pada tahun 2019. Adapun pelayanan minimal yang wajib di berikan kepada masyarakat yang berada di kawasan rawan bencama meliputi tiga layanan sebagai berikut :

1. Pelayanan informasi rawan bencana;

https://jdih.pemalangkab.go.id

2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Evaluasi capaian indikator kinerja perangkat daerah, SPM serta pendanaan pelayanan perangkat daerah pada tahun 2020 – 2024 sebagaimana tabel berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.4. Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Pemalang Tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PD	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PD TAHUN					REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Risiko Bencana					160	155	150	145	165,97	146,38	128,55	115,11	105,76		109,3	120,58	130,31	137,10
2	Indeks Ketahanan Daerah					0,63	0,7	0,75	0,8	0,55	0,66	0,76	0,79	0,8		104,76	108,57	105,33	100,00
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	100				94	95	96	97	90	94	100	100	100		100,00	105,26	104,17	103,09
4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	100				95	95	95	95	94	95	100	100	100		100,00	105,26	105,26	105,26
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	100				100	100	100	100	100	99,71	99,95	100	100		99,71	99,95	100,00	100,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PD	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PD TAHUN					REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
6	Cakupan desa/kelurahan tangguh bencana (%)					4,5	5,86	7,21	8,56	3,3	4,95	6,3	7,65	10,76		110,00	107,51	106,10	125,70

Sumber : BPBD Kabupaten Pemalang, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

Berdasarkan tabel pencapaian kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Pemalang tahun 2020-2024 diatas, indikator capaian yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) serta indikator capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan bencana dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama
   a. Indeks Risiko Bencana (IRBI)

      Indeks Risiko Bencana adalah penentuan tingkat risiko bencana daerah yang dilakukan oleh BNPB melalui penilaian potensi kehilangan atau kerugian (risiko) dengan melakukan kajian risiko bencana. Dalam indeks risiko bencana, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut.

      Sepanjang kurun waktu tahun 2020-2024, Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pemalang dapat diturunkan dari semula 165,97 dengan kategori tinggi pada tahun 2020 menjadi 105,76 dengan kategori sedang pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan target yang ditentukan yaitu 145 maka dikatakan bahwa indikator ini telah melebihi target. Hal ini menunjukkan upaya – upaya yang dilakukan dalam rangka mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas telah dilaksanakan secara optimal.

      Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain :

      1. Meningkatkan kualitas penanganan bencana, melalui perbaikan dalam 7 (tujuh) prioritas yang menjadi indikator dalam penilaian Indeks Ketahanan Daerah yang terdiri dari:
         - Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan;
         - Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu;
         - Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik;
         - Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana;
         - Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
         - Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana; dan
         - Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana
      2. Meningkatkan layanan informasi rawan bencana, antara lain dengan melaksanakan layanan informasi rawan bencana dengan berbagai macam metode, yaitu:
         - Sosialisasi tatap muka;
         - Sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia;
         - Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi; dan
         - Papan informasi publik
      3. Meningkatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana antara lain dengan melaksanakan kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana

https://jdih.pemalangkab.go.id

4. Meningkatkan layanan evakuasi dan tanggap darurat, antara lain dengan melaksanakan :
   - Peningkatan kapasitas SDM dalam penanganan Keadaan darurat di wilayah bencana;
   - Penyediaan logistik permakanan dan pendistribusiannya; dan
   - Mengoperasikan Pusat Pengendalian Operasional BPBD
5. Meningkatkan layanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, antara lain dengan melaksanakan :
   - Pemberian bantuan berupa bahan bangunan ringan kepada warga yang terdampak bencana di Kabupaten Pemalang;
   - Pelatihan untuk meningkatkan produktifitas warga sehingga diharapkan dapat meningkatkan penghasilan bagi warga terdampak bencana;
   - Pembuatan Dokumen Kajian Kebutuhan Pasca bencana;
   - Pembuatan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana

b. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi ketahanan suatu daerah terhadap berbagai tantangan dan ancaman yang timbul, termasuk bencana alam, perubahan iklim, kerawanan sosial, ekonomi, dan faktor lainnya. IKD bertujuan untuk membantu pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengidentifikasi area yang mungkin memerlukan perhatian khusus serta sumber daya untuk meningkatkan ketahanan dan kesiapsiagaan daerah.

Pencapaian IKD dari tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2024 mengalami peningkatan yaitu dari 0,55 pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 0,8 pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan target yang ditentukan pada tahun 2024 yaitu 0,8 maka dikatakan bahwa indikator IKD sudah sesuai dengan target.

2. Pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana

Pencapaian target indikator SPM sub-urusan bencana sampai dengan akhir tahun 2024 sebagaimana tabel diatas yang terdiri atas 3 layanan sebagai berikut :

a. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sebesar 100%
b. Jumlah warga negara yang mempeoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebesar 100%
c. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebesar 100%
d. Cakupan desa/kelurahan tangguh bencana sebesar 10.76

https://jdih.pemalangkab.go.id

Capaian SPM sub-urusan bencana pada akhir tahun 2024 menunjukkan sudah tercapai 100%. Meskipun pada awal tahun 2021 – 2022 terdapat indikator yang masih dibawah target yaitu indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Evaluasi penggunaan Anggaran yang dipergunakan dalam rangka pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah dalam periode tahun 2020 – 2024 sebagaimana tabel berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Kabupaten Pemalang Tahun 2020 – 2024

Uraian Program/Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke- (dalam 000 Rp)					Realisasi Pada Tahun Ke- (dalam 000 Rp)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		6.560.460	6.014.362	5.445.832	5.916.229		5.945.722	5.514.229	5.065.351	5.213.214		90,63%	91,68%	93,01%	88,12%	-161.057,75	-183.127,5
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		240.164	335.000	65.000	111.958		207.205	274.061	64.909	111.423		86,28%	81,81%	99,86%	99,52%	-32.051,5	-23.945,5
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.307.851	4.567.316	4.168.136	4.189.051		3.837.902	4.184.423	3.828.435	3.514.325		89,09%	91,62%	91,85%	83,89%	-29.700	-80.894,25
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		13.100	20.000	5.000			13.062	20.000	5.000			99,71%	100%	100%		-2.700	-2.687,333
Administrasi Umum Perangkat Daerah		391.275		331.196	349.670		377.515		330.358	343.257		96,48%		99,75%	98,17%	-13.868,333	-11.419,333
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		345.000			65.000		322.446			64.813		93,46%			99,71%	-140.000	-128.816,5
Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		378.290	341.500	596.500	536.660		334.969	287.331	557.884	523.620		88,55%	84,14%	93,53%	97,57%	39.592,5	47.162,75
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		884.780	305.000	280.000	663.890		852.623	304.786	278.765	655.776		96,37%	99,93%	99,56%	98,78%	-55.222,5	-49.211,75
Program Penanggulangan Bencana		**4.120.201**	**1.603.000**	**957.350**	**2.501.300**		**3.837.286**	**1.374.899**	**921.924**	**2.466.031**		**93,13%**	**85,77%**	**96,30%**	**98,59%**	**-404.725,25**	**-342.813,75**
Pelayanan Informasi rawan bencana Kabuoaten/Kota		607.132	200.000	279.850	232.950		599.636	196.652	274.134	222.112		98,77%	98,33%	97,96%	95,35%	-93.545,25	-94.381

https://jdih.pemalangkab.go.id

Uraian Program/Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke- (dalam 000 Rp)					Realisasi Pada Tahun Ke- (dalam 000 Rp)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		1.653.069	600.000	382.500	590.000		1.590.877	586.009	360.066	588.512		96,24%	97,67%	94,13%	99,75 %	-265.767,25	-250.591,25
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		1.860.000	803.000	295.000	1.515.850		1.646.774	592.238	287.724	1.497.303		88,54%	73,75%	97,53%	98,78 %	-86.037.5	-37.367,75
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					162.500					158.104					97,29 %		
		10.680.661	**7.617.362**	**6.403.182**	**8.417.529**		**9.783.008**	**6.889.128**	**5.987.275**	**7.679.245**		**91.60%**	**90,44%**	**93,50%**	**91,23 %**	**-565.783**	**-525.940,75**

Sumber : BPBD Kabupaten Pemalang (diolah), 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

Evaluasi penggunaan anggaran yang dapat dianalisa secara lengkap hanya pada tahun 2021 – 2024, untuk tahun 2020 masih menggunakan aturan nomenklatur kodefikasi program kegiatan yang sebelumnya.

Berdasarkan tabel 2.5, pendanaan pelayanan BPBD Kabupaten Pemalang sampai dengan akhir tahun 2024, dapat diketahui bahwa pendanaan penanggulangan bencana dari tahun ke tahun cukup fluktuatif namun pendanaan sesuai dengan prioritas pendanaan daerah dan pada masa tahun tersebut terdapat banyak dampak dari pandemi covid-19 sehingga anggaran banyak dialihkan pada penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi dampak covid-19. Dari aspek rasio penyerapan anggaran rata-rata telah diatas 90% dengan realisasi terbaik pada tahun 2023.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang merupakan perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang mencakup perlindungan masyarakat (warga negara) terhadap bencana, mulai dari tahap prabencana, masa tanggap darurat, sampai pada tahap pascabencana

Adapun kelompok sasaran layanan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang adalah masyarakat (warga negara) yang berada di wilayah Kabupaten Pemalang serta seluruh stakeholder terkait dengan penanganan kebencanaan. Berpijak pada kondisi diatas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang dituntut untuk mampu menghasilkan rumusan kebijakan Pemerintah Daerah yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan publik akan layanan bidang kebencanaan secara maksimal dan komprehensif, serta secara aktif melakukan kemitraan strategis dengan pihak-pihak terkait semisal BASARNAS, BKSDA, Perguruan Tinggi serta Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dibidang kemanusiaan dan kebencanaan.

Kemitraan tersebut diimplementasikan dalam kegiatan antara lain :

1. Kemitraan dengan BASARNAS
   Pencarian dan pertolongan (SAR) terhadap korban/orang hilang dalam musibah atau keadaan darurat
2. Kemitraan dengan BKSDA
   - Perlindungan dan pengamanan terhadap sumber daya alam hayati termasuk perlindungan, pengamanan dan penanggulangan kebakaran kawasan hutan.
   - Pemantauan kawasan rawan bencana alam di kawasan konservasi (cagar alam, hutan lindung)
3. Perguruan Tinggi
   - Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan penelitian
   - Keterlibatan mahasiswa KKN tematik
4. Organisasi Masyarakat
   Kerjasama dengan organisasi masyarakat merupakan perwujudan partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam setiap fase penanggulangan bencana (pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.2.1. Permasalahan

Permasalahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan BPBD Kabupaten Pemalang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah adanya tingginya potensi rawan bencana. Tingginya potensi rawan bencana ini terjadi karena kondisi geografis dan topografisnya yang berada di Pantai utara Pulau Jawa sebagai wilayah pesisir sehingga Kabupaten Pemalang menghadapi risiko gelombang pasang dan abrasi. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pemalang pada tahun 2024 sebesar 105,76 masuk pada kelas resiko sedang. Gelombang pasang ini antara lain adalah dampak dari pemanasan global dan perubahan iklim yang terjadi pada beberapa tahun terakhir. Gelombang pasang atau abrasi di Kabupaten Pemalang disebabkan juga akibat kerusakan ekosistem lingkungan di wilayah pesisir, penebangan pohon mangrove tak terkendali dan sedimentasi. Selain gelombang pasang, bencana lain yang dihadapi Kabupaten Pemalang yaitu banjir, longsor/gerakan tanah. Secara khusus memasuki musim hujan, banjir dan longsor menjadi bencana musiman yang selalu menimpa beberapa kawasan di Kabupaten Pemalang. Bencana longsor dipengaruhi oleh faktor alam seperti kelas kemiringan lereng, drainase permukaan, tekstur tanah, kelembaban.

Selain permasalahan diatas, permasalahan yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten Pemalang, dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana di Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana
    a. Keterbatasan teknologi informasi dan sistem informasi kebencanaan yang dapat diakses semua pihak.
    b. Belum optimalnya edukasi dan literasi kebencanaan pada masyarakat tentang penanggulangan bencana
2. Belum optimalnya pemenuhan dan pemanfaatan sistem peringatan dini oleh masyarakat dan aparatur pemerintah
    a. Belum cukupnya sistem peringatan dini penanggulangan bencana untuk menjangkau luasan daerah rawan
    b. Belum optimalnya literasi kebencanaan terkait peringatan bencana untuk aksi dini
3. Belum optimalnya perencanaan program pembangunan berbasis mitigasi bencana dan ketahanan iklim
    a. Belum optimalnya pengintegrasian kajian dan rencana penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan
    b. Belum diterapkannya secara menyeluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanggulangan bencana
4. Belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
    a. Kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam perhitungan kebutuhan pasca bencana dan rehabilitasi serta rekonstruksi
    b. Sistem data kebencanaan pusat dan daerah belum terintegrasi
    c. Belum optimalnya kapasitas pemerintah daerah dalam rehabilitasi dan rekonstruksi

https://jdih.pemalangkab.go.id

d. Belum optimalnya pemberian bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat

5. Belum optimalnya penanggulangan kedaruratan bencana dan logistik
   a. Belum optimalnya kolaborasi dengan pihak non pemerintah dalam mendukung upaya penanggulangan kedaruratan bencana
   b. Keerbatasan pemanfaatan sumber daya pemerintah daerah dalam melakukan kedaruratan bencana
   c. Belum optimalnya pengelolaan situasi darurat bencana
   d. Belum adanya standar logistik penanggulangan bencana yang ditetapkan tiap tahunnya

2.2.2. Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang serta Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organsisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana yang menjadi kewenangan daerah.

Perumusan isu-isu strategis Pelayanan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pemalang dalam Renstra BPBD Kabupaten Pemalang tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

1. **Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pengalokasian anggaran, perencanaan pembangunan dan penataan ruang**

   Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pengalokasian anggaran, perencanaan pembangunan, dan penataan ruang merupakan upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana ke dalam berbagai aspek pembangunan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan juga mempertimbangkan aspek mitigasi dan adaptasi terhadap dampak bencana, sehingga risiko bencana dapat diminimalkan

   <u>Pengalokasian Anggaran:</u>

   - Pengarusutamaan PRB dalam anggaran berarti memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur, mempertimbangkan aspek keandalan dan ketahanan terhadap bencana.
   - Anggaran harus dialokasikan untuk kegiatan mitigasi bencana, seperti pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, pemetaan wilayah rawan bencana, dan penyediaan sistem peringatan dini.

   <u>Perencanaan Pembangunan</u>

   - Pengarusutamaan PRB dalam perencanaan pembangunan berarti bahwa setiap rencana pembangunan, baik dalam RPJPD, RPJMD harus mempertimbangkan risiko bencana
   - Perencanaan harus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka terpenuhi dalam upaya pengurangan risiko bencana

https://jdih.pemalangkab.go.id

Perencanaan Penataan Ruang

- Pengarusutamaan PRB dalam penataan ruang berarti bahwa tata ruang harus mempertimbangkan lokasi dan jenis penggunaan ruang yang rentan terhadap bencana.
- Penyusunan rencana tata ruang harus melibatkan stakeholder terkait, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk memastikan bahwa rencana tata ruang efektif dalam mengurangi risiko bencana

2. **Peningkatan sinergitas antara pemerintah, Lembaga usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan media (PENTAHELIX) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana**
   Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menjelaskan bahwa Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Dalam perkembangannya, akademisi dan media masa juga memiliki kewajiban untuk turut serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai bidang masing-masing.

3. **Peningkatan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang berorientasi kepada upaya pengurangan risiko bencana**
   - Peningkatan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang berorientasi kepada upaya pengurangan risiko bencana (PRB) berarti fokus pada pembangunan yang lebih tahan bencana, bukan hanya sekadar pemulihan, namun juga pengurangan risiko untuk bencana yang mungkin terjadi di masa depan. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek mitigasi, kesadaran masyarakat, dan perbaikan infrastruktur yang tahan bencana.
   - Peningkatan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berorientasi PRB bertujuan untuk menciptakan wilayah yang lebih tahan bencana dan mengurangi dampak negatif dari bencana di masa depan.

4. **Pengembangan kapasitas dan literasi kebencanaan dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana**
   - Pengembangan kapasitas dan literasi kebencanaan merupakan kunci penting dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Literasi kebencanaan, yang mencakup kemampuan membaca, memahami, dan menggunakan informasi terkait bencana, serta kapasitas yang mengacu pada kekuatan dan sumber daya untuk mengelola risiko bencana, membantu masyarakat untuk bersiap menghadapi bahaya
   - Literasi kebencanaan memungkinkan masyarakat untuk memahami risiko bencana di lingkungan mereka, mengetahui langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi bencana, dan berpartisipasi aktif dalam upaya penanggulangan
   - Pengembangan kapasitas memungkinkan masyarakat untuk memiliki sumber daya yang cukup, pengetahuan yang tepat, dan kemampuan

https://jdih.pemalangkab.go.id

yang memadai untuk menghadapi bencana, baik dalam hal pencegahan, mitigasi, maupun pemulihan

Proses perumusan isu strategis disajikan seperti tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.6. Isu Strategis BPBD Kabupaten Pemalang

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN BPBD	PERMASALAHAN BPBD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN BPBD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN BPBD			ISU STRATEGIS BPBD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Kondisi geografis dan topografi Kabupaten Pemalang	Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana • Keterbatasan teknologi informasi dan sistem informasi kebencanaan yang dapat diakses semua pihak. • Belum optimalnya edukasi dan literasi kebencanaan pada masyarakat tentang penanggulangan bencana	Risiko bencana dan perubahan iklim	Resiko kegagalan Climate Action	Meningkatnya potensi dampak dan risiko bencana geologi	Perkuatan fondasi ekonomi hijau dan penanggulangan risiko bencana	**Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pengalokasian anggaran, perencanaan pembangunan dan penataan ruang**
	Belum optimalnya pemenuhan dan pemanfaatan sistem peringatan dini oleh masyarakat dan aparatur pemerintah • Belum cukupnya sistem peringatan dini penanggulangan bencana untuk		Perubahan iklim	Meningkatnya risiko dan potensi dampak bencana akibat perubahan iklim		**Peningkatan peran dan pendekatan PENTAHELIX (pemerintah, Lembaga usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan media) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana**

https://jdih.pemalangkab.go.id

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN BPBD	PERMASALAHAN BPBD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN BPBD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN BPBD			ISU STRATEGIS BPBD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
	menjangkau luasan daerah rawan • Belum optimalnya literasi kebencanaan terkait peringatan bencana untuk aksi dini					
	Belum optimalnya perencanaan program pembangunan berbasis mitigasi bencana dan ketahanan iklim • Belum optimalnya pengintegrasian kajian dan rencana Penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan • Belum diterapkannya secara menyeluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanggulangan bencana			Pertumbuhan penduduk, alih fungsi lahan dan percepatan perkembangan pusat pusat pertumbuhan dan kawasan investasi		**Pengembangan kapasitas dan literasi kebencanaan dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana**

https://jdih.pemalangkab.go.id

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN BPBD	PERMASALAHAN BPBD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN BPBD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN BPBD			ISU STRATEGIS BPBD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
	Belum optimalnya penanggulangan kedaruratan bencana dan logistik • Belum optimalnya kolaborasi dengan pihak non pemerintah dalam mendukung upaya penanggulangan kedaruratan bencana • Keerbatasan pemanfaatan sumber daya pemerintah daerah dalam melakukan kedaruratan bencana • Belum optimalnya pengelolaan situasi darurat bencana • Belum adanya standar logistik penanggulangan bencana yang ditetapkan tiap tahunnya					

https://jdih.pemalangkab.go.id

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN BPBD	PERMASALAHAN BPBD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN BPBD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN BPBD			ISU STRATEGIS BPBD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
	Belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana • Belum optimalnya kapsitas pemerintah daerah dalam rehabilitasi dan rekonstruksi • Belum optimalnya pemberian bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat					**Peningkatan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang berorientasi kepada upaya pengurangan risiko bencana**

Sumber : Hasil Analisis, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. TUJUAN RENCANA STRATEGIS BPBD

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang periode tahun 2025 – 2029 yaitu "**PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA**". Dari visi tersebut diterjemahkan kedalam misi yaitu **Resik - Hijau - Apik – Peduli – Silaturahmi – Organisatoris – Digitalisasi – Ikhlas.** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi membantu tugas Bupati dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana memiliki keterkaitan dengan Misi Silaturahmi dan Ikhlas yaitu Pengurangan resiko bencana dengan peningkatan kapasitas relawan bencana, penguatan manajemen krisis terpadu serta sistem logistik, untuk operasi tanggap darurat dan penanganan pasca bencana

Berdasarkan Visi Misi dan fokus kerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang masuk kedalam logframe pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 **Pemalang Bersih dan Handal** dengan tujuan yang pertama yaitu Meningkatnya kualitas lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman dan sasaran yang pertama yaitu meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan serta pengelolaan sampah.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka tujuan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang terkait dengan urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang berdasarkan fungsi utama BPBD yaitu **meningkatkan ketahanan daerah**

Tabel 3.1. Tujuan Jangka Menengah BPBD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029

Tujuan	Indikator	Target Tahun						Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatkan ketahanan daerah	Indek Risiko Bencana	100,33-100,72	100,33-98,75	98,83-96,78	97,32-94,81	95,81-92,84	94,31-90,87	

Sumber : Hasil Analisis, 2025

3.2. SASARAN RENCANA STRATEGIS BPBD

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Dengan mengacu kepada tujuan di atas, maka sasaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu tahun 2025-2026 adalah **meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana.**

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pernyataan Tujuan dan Sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SAT	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatkan ketahanan daerah		Indek Risiko Bencana	Indeks	100,33-100,72	100,33-98,75	98,83-96,78	97,32-94,81	95,81-92,84	94,31-90,87
	Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana	Indek Ketahanan Daerah	Indeks	0,8	0,81	0,81	0,82	0,82	0,83

Sumber : Hasil Analisis, 2025

3.3. STRATEGI RENCANA STRATEGIS BPBD

Pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan memerlukan tindak lanjut berupa penyusunan strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pembangunan daerah tahun 2021-2026 secara efektif dan efisien. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Rumusan strategi merupakan cara mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari seluruh pemangku kepentingan. Kemudian strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata yang difokuskan pada prioritas prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.3.Pentahapan Renstra BPBD Kabupaten Pemalang

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan upaya penanggulangan bencana pada kawasan yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi (Kecamatan Watukumpul, Belik, Pulosari)	Peningkatan upaya penanggulangan bencana pada kawasan yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi (Kecamatan Watukumpul, Belik, Pulosari)	Peningkatan upaya penanggulangan bencana pada kawasan yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi (Kecamatan Ulujami, Pemalang, Bantarbolang)	Peningkatan upaya penanggulangan bencana pada kawasan yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi (Kecamatan Ulujami, Pemalang, Bantarbolang)	Peningkatan upaya penanggulangan bencana pada kawasan yang memiliki tingkat kerawanan bencana sedang (Kecamatan Moga, Warungpring, Comal)

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Pentahapan Renstra BPBD Kabupaten Pemalang diwujudkan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Layanan informasi rawan bencana
2. Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Layanan evakuasi dan tanggap darurat
4. Layanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam

3.4. ARAH KEBIJAKAN RENCANA STRATEGIS BPBD

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan tools yang dirumuskan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026. Strategi dan arah kebijakan pembangunan menjadi panduan dalam penentuan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Adapun strategi dan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4. Arah Kebijakan Renstra BPBD Kabupaten Pemalang

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1. Layanan informasi rawan bencana 2. Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pengurangan resiko bencana dengan peningkatan kapasitas relawan bencana, penguatan manajemen	a. Mengintegrasikan mitigasi bencana dalam perencanaan pembangunan melalui pengarusutamaan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	3. Layanan evakuasi dan tanggap darurat	krisis terpadu serta sistem logistik, untuk operasi tanggap darurat dan penanganan pasca bencana;	dokumen pengurangan resiko bencana dalam dokumen perencanaan tata ruang b. Meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat melalui pelatihan, simulasi dan sosialisasi edukasi masyarakat c. Meningkatkan peralatan sarpras mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui penyediaan peralatan penanggulangan bencana d. Pembentukan dan penguatan desa tangguh bencana e. Meningkatkan sarpras penanganan darurat bencana f. Meningkatkan kapasitas SDM penanggulangan bencana melalui Sosialisasi dan pelatihan SDM penanggulangan bencana g. Menyediakan kebutuhan bantuan logistik darurat bencana h. Membantu pemulihan masyarakat terdampak bencana melalui pelatihan dan pemberian bantuan sarpras dalam rangka pemulihan sosial ekonomi serta pemberian bantuan rumah korban terdampak bencana i. Pengembangan sistem pemulihan bencana melalui penyusunan dokumen JITUPASNA dan R3P serta Bimbingan teknis pasca bencana	

Sumber : Hasil Analisis, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.5. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan BPBD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan ketahanan daerah	Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana	1. Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana	1.1. Mengintegrasikan mitigasi bencana dalam perencanaan pembangunan melalui pengarusutamaan dokumen pengurangan resiko bencana dalam dokumen perencanaan tata ruang
			1.2. Meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat melalui pelatihan, simulasi dan sosialisasi edukasi masyarakat
			1.3. Meningkatkan peralatan sarpras mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui penyediaan peralatan penanggulangan bencana
			1.4. Pembentukan dan penguatan desa tangguh bencana
		2. Meningkatkan penanganan darurat bencana	2.1. Meningkatkan sarpras penanganan darurat bencana
			2.2. Meningkatkan kapasitas SDM penanggulangan bencana melalui Sosialisasi dan pelatihan SDM penanggulangan bencana
			2.3. Menyediakan kebutuhan bantuan logistik darurat bencana
		3. Meningkatkan penanganan pasca bencana	3.1. Membantu pemulihan masyarakat terdampak bencana melalui pelatihan dan pemberian bantuan sarpras dalam rangka pemulihan sosial ekonomi serta pemberian bantuan rumah korban terdampak bencana
			3.2. Pengembangan sistem pemulihan bencana melalui penyusunan dokumen JITUPASNA dan R3P serta Bimbingan teknis pasca bencana

Sumber : Hasil Analisis, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana di Kabupaten Pemalang, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD periode 2025 – 2029, yaitu :

1. **Program Penanggulangan Bencana**
   Program Penanggulangan Bencana merupakan program utama BPBD Kabupaten Pemalang dalam membantu tugas Bupati Pemalang dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana di Kabupaten Pemalang.
   Program ini berisikan kegiatan pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta kegiatan penataan sistem dasar penangggulangan bencana
2. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota**
   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota merupakan program berisikan kegiatan penunjang operasional perangkat daerah, yang meliputi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, administrasi kepegawaian perangkat daerah, adminitrasi umum perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah serta pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dana pendanaan indikatif yang direncanakan guna mendukung pencapaian indikator sasaran strategis yang ada di BPBD Kabupaten Pemalang dalam Renstra tahun 2025 - 2029 sebagaimana tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4. 1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra BPBD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pengurangan Risiko Bencana	Meningkatkan ketahanan daerah		Meningkatnya ketahanan daerah	Penurunan risiko bencana	Indek Risiko Bencana (IRBI)		
		Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana			Indek Ketahanan Daerah (IKD)		
			Meningkatnya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	
						Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten /Kota	
						Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	
					Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
						Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
						Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	
						Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi (Renkon)	
						Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
						Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten /Kota	
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kab/Kota	
						Sub Kegiatan Pelatihan pencegahan dan mitigasi Bencana Kabupaten/ kota	
			Meningkatnya penanganan darurat bencana		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
						Sub Kegiatan Respon Ceoat Darurat Bencana	
						Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Korban Bencana Kabupaten/ Kota	
						Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	
			Meningkatnya penanganan pasca bencana		Jumlah Warga Negara terdampak bencana yang memperoleh pelayanan rehabilitasi	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Warga Negara terdampak bencana yang memperoleh pelayanan rekonstruksi		
						Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Koordinasi penanganan Pascabencana	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	
						Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	

Sumber : Hasil Analisis, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SAT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
TUJUAN	Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana		IRBI	indek	105,46	100,84-100,72		98,83-96,78		97,32-94,81		95,81-92,84		94,31-90,87	
SASARAN	Meningkatnya ketahanan daerah		IKD	indek	0,8	0,81		0,81		0,82		0,82		0,83	
	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		SAKIP	Indeks	64,69	64,69		64,72		64,72		64,75		64,75	
			IKM	Indeks	87,63	88,65		88,70		88,70		88,75		88,75	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						**665.009.000**		**1.377.820.920**		**1.377.820.920**		**1.377.820.920**		**1.377.820.920**
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**%**	**100**	**100**	**50.000.000**	**100**	**150.000.000**	**100**	**150.000.000**	**100**	**150.000.000.**	**100**	**150.000.000**
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen sampai dinyatakan sah/legal	dokumen		0		0	0	0	0	1	0	0	0
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai dengan target yang akan dipenuhi	%		30	50.000.000	400	150.000.000	400	150.000.000	400	150.000.000	400	150.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SAT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	**%**	**100**	**100**	**185.009.000**	**100**	**420.000.000**	**100**	**420.000.000**	**100**	**420.000.000**	**100**	**420.000.000**
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Prosentase pembentukan desa tangguh bencana	%	15,09	**2**	90.009.000	16,51	150.000.000	17,92	150.000.000	19,81	150.000.000	21,23	150.000.000
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas TRC	kegiatan		0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
		Penyusunan Rencana Kontijensi (Renkon)	Jumlah Dokumen sampai dinyatakan sah/legal	dokumen		1	35.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan (Gladi)	orang		30	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen sampai dinyatakan sah/legal	dokumen		0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kab/Kota	Jumlah peralatan yang tersedia	unit		0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
		Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/ kota	jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	orang		40	30.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SAT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**%**	**100**	**100**	**225..000.000**	**100**	**450.000.000**	**100**	**450.000.000**	**100**	**450.000.000**	**100**	**450.000.000**
		Respon Cepat Darurat Bencana	Jumlah Dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SK PDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	Dokumen		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi teradap kejadian bencana	orang		100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Orang		0	0	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SAT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Logistik penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Pistribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	orang		50	75.000.000	200	250.000.000	200	250.000.000	200	250.000.000	200	250.000.000
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Jumlah Warga Negara terdampak bencana yang memperoleh pelayanan rehabilitasi	**%**	**100**	**100**	**205.000.000**	**100**	**357.820.920**	**100**	**357.820.920**	**100**	**357.820.920**	**100**	**357.820.920**
			Jumlah Warga Negara terdampak bencana yang memperoleh pelayanan rekonstruksi	%	100	100		100		100		100		100	
		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	dokumen	-	1	5.000.000	1	7.820.920	1	7.820.920	1	7.820.920	1	7.820.920
		Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota. lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota dan relawan yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen	orang		40	50.000.000	40	100.000.000	40	100.000.000	40	100.000.000	40	100.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SAT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)												
		Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	kegiatan		1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
		Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	dokumen		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SAT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	dokumen		1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	**Nilai SAKIP**	**Nilai**		**100**	**8.864.000.000**	**100**	**7.764.000.000**	**100**	**7.764.000.000**	**100**	**7.764.000.000**	**100**	**7.814.000.000**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi	%			**300.000.000**		**300.000.000**		**300.000.000**		**300.000.000**		**350.000.000**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	3	100.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		30	45.000.000	30	45.000.000	30	45.000.000	30	45.000.000	30	45.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		30	35.000.000	30	35.000.000	30	35.000.000	30	35.000.000	30	35.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SAT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		30	45.000.000	30	45.000.000	30	45.000.000	30	45.000.000	30	45.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		30	35.000.000	30	35.000.000	30	35.000.000	30	35.000.000	30	35.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		19	45.000.000	19	45.000.000	19	45.000.000	19	45.000.000	19	45.000.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		8	45.000.000	8	45.000.000	8	45.000.000	8	45.000.000	8	45.000.000
		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berasarkan bidang urusan yang diampu	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat	Berita Acara		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SAT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi	%			**4.920.000.000**		**4.920.000.000**		**4.920.000.000**		**4.920.000.000**		**4.920.000.000**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan		392	4.800.000.000	392	4.800.000.000	392	4.800.000.000	392	4.800.000.000	392	4.800.000.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Laporan		18	50.000.000	18	50.000.000	18	50.000.000	18	50.000.000	18	50.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SAT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD												
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi	%			**48.000.000**		**48.000.000**		**48.000.000**		**48.000.000**	**48.000.000**
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		2	48.000.000	2	48.000.000	2	48.000.000	2	48.000.000	2	48.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	%			**145.000.000**		**145.000.000**		**145.000.000**		**145.000.000**		**145.000.000**
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SAT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		60	60.000.000	60	60.000.000	60	60.000.000	60	60.000.000	60	60.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi	%			**551.000.000**		**551.000.000**		**551.000.000**		**551.000.000**		**551.000.000**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SAT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		12	36.000.000	12	36.000.000	12	36.000.000	12	36.000.000	12	36.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	%			1.250.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
		Pengadaan alat besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit		1	1.000.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		1	50.000.000	1	50.000.000.	1	50.000.000.	1	50.000.000.	1	50.000.000.
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SAT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		2	800.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%			**945.000.000**		**945.000.000**		**945.000.000**		**945.000.000**		**945.000.000**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		12	85.000.000	12	85.000.000	12	85.000.000	12	85.000.000	12	85.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SAT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12	600.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	%			**705.000.000**		**655.000.000**		**655.000.000**		**655.000.000**		**655.000.000**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		25	150.000.000	25	150.000.000	25	150.000.000	25	150.000.000	25	150.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit		1	50.000.000								
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit		100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SAT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		20	35.000.000	20	35.000.000	20	35.000.000	20	35.000.000	20	35.000.000
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Penanggulangan Bencana	1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten /Kota b. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana a. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan b. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota c. Penyusunan Rencana Kontijensi (Renkon) d. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana e. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten /Kota f. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kab/Kota g. Pelatihan pencegahan dan mitigasi Bencana Kabupaten/ kota 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana a. Respon Cepat Darurat Bencana b. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat d. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota 4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana a. Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota b. Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota c. Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota d. Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota e. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	

Sumber : Hasil Analisis, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah keberhasilan pencapaian visi dan misi daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja daerah digunakan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, dan merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcome/hasil) dari kegiatan (output/keluaran).

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan dimasa mendatang. Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcome) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak.

Indikator kinerja utama (IKU) urusan Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana sebagai berikut :

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Trantibumlinmas (Sub Urusan Bencana)

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indikator Tujuan									
	Indek Risiko Bencana	Indek	105,46	100,33-100,72	100,33-98,75	98,83-96,78	97,32-94,81	95,81-92,84	94,31-90,87	
2	Indikator Sasaran									

https://jdih.pemalangkab.go.id

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	(IKU) Sub Urusan Bencana									
	Indek Ketahanan Daerah	Indek	0,8	0,8	0,81	0,81	0,82	0,82	0,83	

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Trantibumlinmas (Sub Urusan Bencana)

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah Warga Negara terdampak bencana yang memperoleh pelayanan rehabilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Jumlah Warga Negara terdampak bencana yang memperoleh pelayanan rekonstruksi	%	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Hasil Analisis, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Pemalang mempunyai peran yang sangat strategis dalam proses pembangunan daerah. Renstra BPBD Kabupaten Pemalang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Renstra BPBD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 untuk terwujudnya masyarakat **PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA**.

Dokumen Renstra BPBD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 harus dilaksanakan secara konsisten dan memerlukan komitmen penuh seluruh pejabat dan staf BPBD Kabupaten Pemalang serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan BPBD kabupaten Pemalang tahun 2025 – 2029 serta menjadi acuan dalam penyusunan Renja BPBD dan menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah pada tahun 2030 sebagai tahun transisi

Dengan memperlihatkan bab-bab yang diuraikan sebelumnya dalam dokumen ini, dapat disimpulkan bahwa kondisi akhir yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana periode tahun 2025 – 2029 adalah meningkatnya kemandirian masyarakat dalam rangka turut serta bersama dengan pemerintah melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, sehingga ketahanan daerah dalam mengelola potensi ancaman bencana serta penanganan awal kejadian bencana secara mandiri dapat terwujud.

Renstra BPBD Kabupaten Pemalang merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis BPBD Kabupaten Pemalang maka telah tersusun salah satu perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksana. Sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terdiri dari masa Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana dapat dirasakan secara lebih adil dan merata untuk masyarakat.

Sangat dimungkinkan akan terjadi perubahan yang dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim, baik yang bersifat nasional maupun

https://jdih.pemalangkab.go.id

global yang dapat mengubah situasi maupun kebijakan sehingga rencana strategis yang telah disusun ini memerlukan penyesuaian. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan pengendalian risiko strategis perangkat daerah dan evaluasi Renstra perangkat daerah minimal 1 kali dalam lima tahun

Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance***.**

Pemalang, Juni 2025
KEPALA PELAKSANA
BPBD KABUPATEN PEMALANG

Drs. ANDRI ADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730826 199303 1 004

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota bertugas membantu bupati/wali kota dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten/kota. Hal ini selaras Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang kesatuan bangsa dan politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara proaktif berperan dalam menciptakan kondusifitas wilayah sehingga masyarakat dapat nyaman berkegiatan ekonomi dan dapat menarik investor atau pelaku usaha untuk berinvestasi atau membuka usaha di Kabupaten Pemalang. Hal ini akan membuka lapangan kerja baru sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Agar tujuan tersebut dapat tercapai harus didukung oleh perencanaan yang baik sehingga perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang sebagai salah satu Perangkat Daerah harus menyusun Renstra. Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029..

https://jdih.pemalangkab.go.id

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Renstra menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan keterkaitan antara tujuan dan sasaran Daerah dengan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, dimana program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang harus mendukung tujuan dan sasaran Daerah sehingga visi dan misi Daerah dapat tercapai.

Proses penyusunan Renstra meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, terdiri dari pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah, agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah; (4) Forum Perangkat Daerah; (5) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (6) Penetapan Renstra Perangkat Daerah. Tahapan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disajikan dalam bagan berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Sumber : Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang. Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut :

Gambar 1.2

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

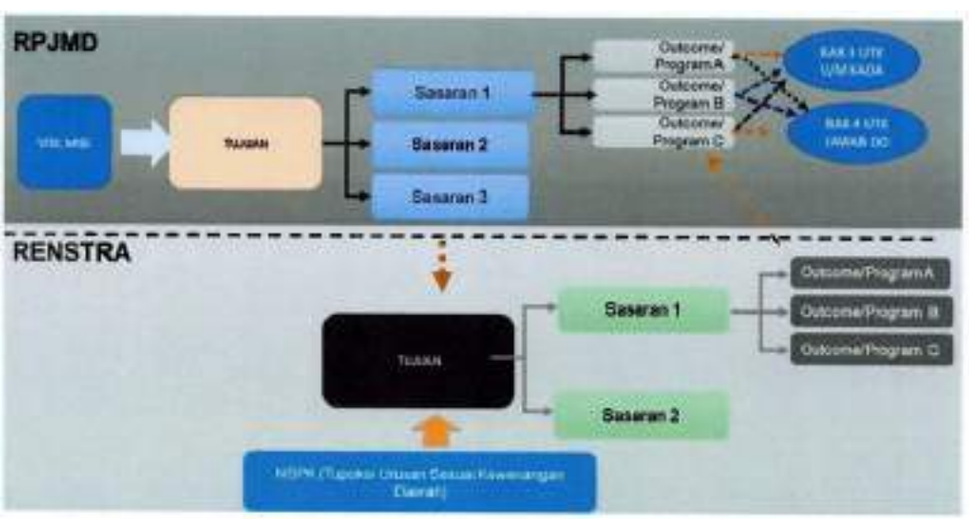

https://jdih.pemalangkab.go.id

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

https://jdih.pemalangkab.go.id

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor xxx);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

https://jdih.pemalangkab.go.id

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor... Tahun... tentang Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 – 2029; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor...Tahun.....tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor....Tahun...tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun...Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor...);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor....Tahun...tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten PemalangNomor 13 Tahun 2016

https://jdih.pemalangkab.go.id

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
30. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan dan;
2. Memberikan arah dalam melayani masyarakat sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen aparatur perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah disepakati bersama.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.
2. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.
3. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang yang memuat program dan Kegiatan

https://jdih.pemalangkab.go.id

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 mengacu pada Imendagri Nomor 2 Tahun 2025, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, sumber daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, kelompok sasaran yang dilayani Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, Mitra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, dukungan BUMD dan Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, Permasalahan dan Isu-isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang.
3. Bab III Tujuan dan Sasaran, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, Strategi dan Arah Kebijakan, berisi strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang dalam 5 (lima) tahun mendatang.
4. Bab IV Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan. berisi tentang uraian Program dan Kegiatan, Uraian Sub Kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah, Target Capaian Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
5. Bab V Penutup, berisi kaidah pelaksanaan dan Evaluasi Pengendalian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PEMALANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik. Sedangkan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut uraian tugas jabatan struktural Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang berdasar Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang :

A. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
3. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. Mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik;
5. Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
6. Mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan unsur SPIP;
7. Mengarahkan pengelolaan administrasi umum perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang kesatuan bangsa dan politik;

https://jdih.pemalangkab.go.id

8. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
9. Merumuskan inovasi daerah urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
10. Merumuskan laporan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
11. Melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai uraian tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan politik, dalam melaksanakan tugas tersebut, sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Bakesbangpol;
2. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Bakesbangpol;
3. Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Bakesbangpol;
4. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Bakesbangpol;
5. Penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
6. Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Bakesbangpol,
7. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Bakesbangpol, dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan.
2. Mengoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
3. Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan.
4. Menyelenggarakan pemberian koordinasi, dukungan meliputi pelayanan ketatausahaan, pembinaan, administrasi kepegawaian, pengelolaan kedinasan

https://jdih.pemalangkab.go.id

hukum, dan yang keuangan, kerumahtanggan, barang milik daerah, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dokumentasi dan pengadaan barang/ jasa.

5. Menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian.
6. Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik.
7. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan unsur SPIP.
8. Menyusun konsep inovasi kesekretariatan.
9. Mengoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang- bidang.
10. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan.
11. Mengoordinasikan penyusunan laporan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. Kepala Subbagian Bina Progran dan Keuangan

a. Tugas:

   Kepala tugas Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program dan keuangan.

b. Uraian Tugas:

   Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

   1) Merencanakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan.
   2) Menyusun usulan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Rencana Dokumen Pelaksanaan Kerja dan Anggaran Anggaran (DPA) serta (RKA) dan dokumen perencanaan lainnya.
   3) Melaksanakan pengelolaan administrasi bina program dan keuangan.
   4) Mengelola data urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
   5) Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran.
   6) Menyusun konsep dokumen pertanggungjawaban kinerja yang meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dokumen pertanggungjawaban lainnya.
   7) Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta laporan keuangan lainnya.

8) Menyiapkan bahan inovasi Subbagian Bina Program dan Keuangan.
9) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan unsur SPIP.
10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Bina Program dan Keuangan.
11) Menyusun bahan laporan urusan pemerintahan pada bidang kesatuan bangsa dan politik.
12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Bina Program dan Keuangan.
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

D.Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

a. Tugas:

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

b. Uraian Tugas:

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
2) Mengelola penyusunan administrasi barang perencanaan milik kebutuhan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, daerah meliputi pengamanan, penatausahaan, pemanfaatan dan penyusunan laporan barang milik daerah.
3) Mengelola administrasi umum meliputi surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan.
4) Mengelola administrasi kehumasan meliputi keprotokolan dan informasi publik.
5) Mengelola administrasi kerumahtanggaan meliputi pengadaan, penyediaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan jasa penunjang, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas.

https://jdih.pemalangkab.go.id

6) Mengelola administrasi kepegawaian.
7) Mengelola ketatalaksanaan meliputi penyusunan sistem dan prosedur kerja.
8) Memfasilitasi pemberian rekomendasi izin penelitian lingkup Daerah.
9) Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik.
10) Menyiapkan bahan Kepegawaian. inovasi Subbagian Umum dan
11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian.
12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian.
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

D. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa

Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan bidang kesatuan bangsa sesuai dengan dokumen perencanaan.
2. Menyusun rancangan kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa.
3. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa.
4. Menyelenggarakan program dan kegiatan ideologi dan ketahanan bangsa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar tepat sasaran dan tujuan;
5. Menyelengggarakan program dan kegiatan kewaspadaan dini sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar tepat sasaran dan tujuan;
6. Menyelengggarakan program dan kegiatan penanganan konflik sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar tepatsasaran dan tujuan;
7. Menyusun rancangan inovasi bidang kesatuan bangsa berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektifitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa secara komprehensif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam mendukung kinerja organisasi.

https://jdih.pemalangkab.go.id

E. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan pedoman pelaksanaaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
2. Menyusun konsep kebijakan bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan sesuai tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Menyelenggarakan program dan kegiatan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar tepat sasaran dan tujuan;
4. Menyusun rancangan inovasi bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektifitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
7. Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan secara komprehensif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam mendukung kinerja organisasi.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang

Sumber daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

a. Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Jumlah pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.

Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Golongan				Jumlah
				I	II	III	IV	
1	Kepala Badan	1	-	-	-	-	1	1
2	Sekretaris Badan	1	-	-	-	-	1	1
3	Kabid	1	-	-	-	1	-	1
4	Kasubag/Kasubid	1	1	-	-	2	-	2
5	Pelaksana	9	3	-	3	8	1	12
6	Non ASN	20	8	-	-	-	-	28
Jumlah		33	12	-	3	11	3	45

Sumber : Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, 2025

Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang berjumlah 45 orang, meliputi 33 orang laki-laki dan 12 orang perempuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang dominan laki-laki yaitu sebanyak 73.33%. Selanjutnya jumlah pegawai berdasar golongan, meliputinon ASN sebanyak 17 orang, golongan II sebanyak 3 orang, golongan III sebanyak 11 orang dan golongan IV sebanyak 3 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang didominasi oleh non ASN sebanyak 62.222%. Sedangkan jika dilihat berdasar pegawai ASN, didominasi oleh pegawai bergolongan III yaitu sebanyak 64,7%.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.2.

Data Pegawai Berdasar Diklat Kepemimpinan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Diklatpim II	1	1	-
2	Diklatpim III	-	-	-
3	Diklatpim IV	1	-	1
4	ADUM	-	-	-
5	SEPADA	-	-	-
6	Struktural yang belum diklat	3	3	-
Jumlah		~~5~~	4	1

Sumber : Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, 2025

Jumlah pegawai berdasarkan diklat kepemimpinan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, yaitu 1 orang sudah mengikuti Diklatpim II, 2 orang belum mengikuti Diklatpim III, 1 orang sudah mengikuti Diklatpim IV, 3 orang belum mengikuti diklat kepemimpinan, hal ini disebabkan masih menunggu penyelenggaraan diklat dari instansi yang berwenang.

Tabel 2.3.

Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pasca Sarjana (S2)	3	3	-
2	Sarjana (S1)	25	18	7
3	Diploma	6	3	3
4	SLTA	11	9	2
5	SLTP	-	-	-
6	SD	-	-	-
Jumlah		45	33	12

Sumber : Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, 2025

Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang berdasar tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S2) sebanyak 3 orang, Sarjana (S1) sebanyak 25 orang, Diploma sebanyak 6 orang, SLTA sebanyak 11 orang, SLTP sebanyak 0 orang dan SD sebanyak 0 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara kualitas

https://jdih.pemalangkab.go.id

SDM di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang sudah cukup untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi karena pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang dominan berpendidikan Sarjana (S1) yaitu sebanyak 55,5%

Tabel 2.4.

Data Pegawai Berdasar Tingkat Eselon

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	II/c	1	1	-
2	II/d	2	2	-
2	III/a	2	-	2
3	III/b	2	1	1
4	III/c	1	1	-
5	III/d	6	5	1
6	IV/a	1	1	-
7	IV/b	2	2	-
Jumlah		17	13	4

Sumber : Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, 2025

Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang berdasarkan tingkat eselon, yaitu Eselon II/c sebanyak 1 orang, Eselon II/d sebanyak 2 orang, Eselon III/a sebanyak 2 orang, Eselon III/b sebanyak 2 orang, Eselon III/c sebanyak 1 orang, Eselon III/d sebanyak 6 orang, Eselon IV/a sebanyak 1 orang dan Eselon IV/b sebanyak 2 orang sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang berdasarkan tingkat eselon cukup merata untuk menunjang kinerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

b. Sarana dan Prasarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5.

Inventaris Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang

No	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
1	01	-	Tanah	-	-	-
2	01	1.3.2	Peralatan dan Mesin	161	2.772.043.207	Baik
3	03	-	Gedung dan Bangunan	1	-	Sewa
4	04	1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2	3.500.000	Baik
5	05	1.3.5	Aset Tetap Lainnya	9	500.000	Baik
6	06	-	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-
7	07	1.5.4	Aset Lain-lain	1	17.992.500	Baik
			Jumlah Total	173	2.794.035.707	-

Sumber : Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang,2025

Dari aset yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang secara keseluruhan dalam kondisi baik sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang bernilai kecil dikarenakan tanah dan gedung merupakan hak milik Pengadilan Negeri dengan status pinjam pakai.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang

Tabel 2.6a.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang

Berdasarkan Renstra Tahun 2020– 2024

No	IndikatorSesuai Tugas danFungsi SKPD	Satuan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capian Pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
1	Angka Kriminalitas	Angka				200	200	190	190	185	-		126	76,20	78,09	-	-	66,31	101,57	-
2	Indeks Kerukunan Umat beragama	Indeks				NA	67	67,97	68,94	69,91	NA	71,55	74,84	74,90	74,78	NA	106,8	110,1	108,64	106,96
3	Jumlah Konflik Sosial	Kasus				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Jumlah Konflik Agama	Kasus				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Potensi Konflik Sosial yang tertangani	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase Potensi Konflik Agama yang tertangani	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks				-	82,10	82,13	82,16	82,19	-	86,8	86,90	87,02	87,10	-	105,72	105,80	105,91	105,97
8	SAKIP	Skor				47,84	49,45	52,77	55,35	57,87	47,84	48,22	62,6	64,05	65,55	100	97,51	118,62	115,71	113,27
9	IRB	Indeks				28,02	30,02	32,35	35,87	37,35	36,30	54,24	67,70	68,97	69,01	129,55	180,6	209,27	192,27	184,76
10	Persentase Masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%				75	80	82	85	88	75	80	82	85	88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Persentase Masyarakat yang paham politik	%				40	45	50	55	60	40	45	50	55	60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Persentase Ormas yang paham penanganan masalah sosial kemasyarakatan	%				50	60	70	80	80	50	60	70	80	80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Persentase Masyarakat yang paham kewaspadaan dan deteksi dini sosial	%				50	55	60	65	70	50	55	60	65	70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Persentase Masyarakat yang paham ketahanan ekonomi, sosialdan budaya	%				45	55	60	65	70	45	55	60	65	70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.6b.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang
Berdasarkan Renstra Tahun 2025– 2030

No	Urusan/Program		Indikator Program	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Sumber	Realisasi					Target						Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
A	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**		
1	**Kesbangpol**																		
	SEBARAN INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN																		
	TUJUAN	Meningkatnya Harmoni sosial, ekonomi, budaya, keberagamaan dalam masyarakat																	
			Indeks Harmoni Indonesia	Indeks Harmoni Indonesia adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat harmoni dan kerukunan antar kelompok sosial, budaya, dan agama di suatu wilayah. Penghitungan indeks ini dilakukan dengan menggabungkan nilai dari berbagai indikator yang mencerminkan tiga dimensi utama: persepsi masyarakat, partisipasi masyarakat, dan aksesibilitas terhadap layanan publik.	angka	Kajian Indeks Harmoni Indonesia di tingkat Kabupaten Pemalang	Na	Na	Na	Na	Na	7,07	7,2	7,4	7.6	7.7	7.8	Upaya peningkatan harmoni baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, maupun religius harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Program-program berbasis dialog antar kelompok, pendidikan multikultural pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, serta optimalisasi peran tokoh masyarakat dan agama menjadi strategi yang dapat diterapkan guna menambah tingkat harmoni	1. Radikalisasi dan Intolerans 2. Ekonomi dan Kesenjangan Sosial 3. Politik Identitas

https://jdih.pemalangkab.go.id

																		masyarakat Kabupaten Pemalang	
	SASARAN	Menurunnya potensi dan kejadian konflik SARA serta meningkatnya toleransi antar kelompok masyarakat.	Konflik SARA	Jumlah konflik SARA	Kasus		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Perbedaan pandangan dan kepentingan, Kesenjangan sosial dan adanya tindak kekerasan	Masyarakat yang harmonis, toleransi terjaga, terwujudnya demokrasi.
			IKM				-	86,8	86,90	87,02	87,10	87,30	87,50	87,90	88	88,20	88,50		
	SEBARAN INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN																		
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan																	
			Persentase warga negara Indonesia yang mendapat wawasan bela negara	Jumlah peserta sosialisasi, upacara 17 agustus dan Paskibraka (dari tingkat SMA, Kecamatan dan Kabupaten) dibagi jumlah penduduk dikali 100%			75	80.85	82	85	88	88,5	88,6	88,7	88.8	88,9	90		
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya etika dan budaya politik																	
			Indeks	Indeks Demokrasi	angka	Kajian Indeks	Na	Na	Na	Na	76.12	76.20	77	77,50	78	79	80	1. Pendidikan dan	1. Korupsi dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

			Demokrasi Indonesia	Indonesia (IDI) adalah Indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Indikator ini didapatkan melalui kompilasi berbagai fenomena terkait demokrasi yang terjadi di suatu daerah, dengan 3 aspek pengukuran; Aspek kebebasan, kesetaraan dan aspek kapasitas lembaga demokrasi		Demokrasi Indonesia di tingkat Kabupaten Pemalang											Penyuluhan tentang demokrasi 2. Fasilitasi diskusi publik 3. Pemberdayaan komunitas 4. Penggunaan teknologi untuk kemudahan akses informasi 5. mendorong peran pemuda 6. kegiatan sosial budaya	penyalahgunaan kekuasaan 2. Kualitas pemilihan umum yang buruk 3. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi 4. Polarisasi politik dan pembatasan ruang publik 5. Intimidasi dan kriminalisasi
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan																	

https://jdih.pemalangkab.go.id

			Indeks Kinerja Ormas	Indeks Kinerja Ormas dihitung dengan pendekatan skoring berdasarkan bobot dari masing-masing indikator. Terdapat 2 Variabel, 8 Indikator dalam pengukuran Indeks Kinerja Ormas	Angka	Kajian Indeks Kinerja Ormas Kabupaten Pemalang Tahun 2025	Na	Na	Na	Na	Na	72	72.3	72.5	72.7	73	73.3	1. Pengawasan Ormas; memastikan ormas beroperasi sesuai dengan peraturan, prosedur dan standar yang telah ditetapkan 2. Tata kelola Ormas; mengacu pada cara ormas mengatur dan mengelola sumber daya yang ada termasuk struktur organisasi, sistem manajerial, pembagian tugas, dan pengelolaan keuangan. 3. Partisipasi Masyarakat;sejauh mana masyarakat di Kabupaten Pemalang terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormas.	1. Ketidakmampuan ormas dalam memgelola organisasi dan sumberdaya yang dimilikinya 2. Program kerja yang tidak memberi manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat 3. Akuntabilitas;sejauh mana Ormas dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah atau sponsor
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya ketahanan ekonomi sosial dan budaya masyarakat																	
			Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks yang menggambarkan sejauh mana tingkat kerukunan umat beragama. IKUB diukur melalui tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.	angka	Laporan IKUB Kabupaten Pemalang	0	71.55	74.84	74.90	74.78	75	75.50	76	76.50	77	77.50	1. Sikap toleransi; menghormati dan menghargai antar pemeluk agama 2. Prinsip kesetaraan/tidak diskriminatif; kesetaraan dalam hukum, kesetaraan peluang, kesetaraan gender, kesetaraan sosial 3. Kerjasama; interaksi atau	1. Fanatisme Agama 2. Kurangnya toleransi 3. Pengaruh politik atau kepentingan lain 4. sistem doktrinasi keagamaan 5. Penodaan agama

https://jdih.pemalangkab.go.id

																		realitas hubungan sosial dalam bentuk tindakan nyata	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial																	
			Indeks kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN) dihitung dengan pendekatan skoring berdasarkan bobot dari masing-masing indikator. Terdapat 5 Dimensi 13 Variabel 18 Indikator dalam pengukuran Indeks kewaspadaan Nasional (IKN)	Angka	Kajian Indeks Kewaspadaan Nasional di tingkat Kabupaten Pemalang Tahun 2025	Na	Na	Na	Na	Na	7.1	7.3	7.5	7.7	7.9	8		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	Meningkatnya kualitas akuntabilitas perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Hasil penilaian dari Tim Evaluasi Sakip Inspektorat Kabupaten Pemalang															

https://jdih.pemalangkab.go.id

Berdasarkan tabel 2.6a. dapat diketahui pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang selama tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Melebihi target, meliputi :
   - Indeks Kerukunan Umat Beragama
   - Indeks Kepuasan Masyarakat
   - SAKIP
   - IRB

   Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :

   a. Komitmen dari semua pihak;
   b. Sarana dan prasarana yang memadai;
   c. Peningkatan kapasitas SDM;
   d. Komunikasi dan koordinasi yang intens antar instansi.
2. Memenuhi target, meliputi :
   - Persentase penurunan konflik sosial
   - Persentase penurunan konflik agama
   - Persentase Masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
   - Persentase Masyarakat yang paham politik
   - Persentase Ormas yang paham penanganan masalah sosial kemasyarakatan
   - Persentase Masyarakat yang paham kewaspadaan dan deteksi dini sosial
   - Persentase Masyarakat yang paham ketahanan ekonomi, sosialdan budaya

   Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :

   a. Komitmen dari semua pihak;
   b. Sarana dan prasarana yang memadai;
   c. Peningkatan kapasitas SDM;
   d. Komunikasi dan koordinasi yang intens antar instansi.
3. Tidak memenuhi target, meliputi :
   - Angka Kriminalitas, Angka kriminalitas dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait, baik faktor internal individu maupun faktor eksternal lingkungan

     Faktor-faktor Penyebab Kriminalitas:

     a. Faktor Ekonomi:
        - Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

https://jdih.pemalangkab.go.id

- Pengangguran
- Pertumbuhan Ekonomi

b. Faktor Sosial:

- Pendidikan
- Kepadatan Penduduk
- Ketidakadilan Sosial
- Disintegrasi Budaya
- Kurangnya Solidaritas Sosial

c. Faktor Individu:

- Karakter dan Kepribadian
- Pengaruh Kelompok Sebaya
- Penyalahgunaan Narkoba dan Alkohol

d. Faktor Lingkungan:

- Desain Lingkungan
- Faktor Geografis

Tabel 2.7

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang

Berdasarkan Bab II RPJMD tahun 2025 – 2029

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah konflik sosial	Kasus	0	0	0	0	0
2	Persentase potensi konflik sosial yang tertangani	%	100	100	100	100	100
3	Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	75	80	82	85	88
4	Persentase masyarakat yang paham politik	%	40	45	50	55	60
5	Persentase organisasi kemasyarakatan yang paham penanganan masalah sosial kemasyarakatan	%	50	65	70	80	80
6	Persentase masyarakat yang paham kewaspadaan dan deteksi dini konflik sosial	%	50	55	60	65	70
7	Jumlah konflik agama	kasus	0	0	0	0	0
8	Persentase potensi konflik agama yang tertangani	%	100	100	100	100	100
9	Persentase masyarakat yang paham ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%	45	55	60	65	70

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, 2025

Capaian penurunan konflik sosial selama kurun waktu tahun 2020-2024 sebesar 100%. Konflik sosial adalah pertikaian antar warga (antar etnis, antar wilayah desa, antar simpatisan parpol, antar pelajar) dan unjuk rasa (politik, ekonomi) yang terjadi

https://jdih.pemalangkab.go.id

akibat perbedaaan cara pandang yang meluas dan mengakibatkan konflik di masyarakat skala kabupaten. Selama kurun waktu tahun 2020-2024 di Kabupaten Pemalang tidak terjadi konflik sosial dan agama, hal ini menunjukkan adanya kehidupan yang harmonis dan kondusif antar masyarakat di Kabupaten Pemalang. Semua potensi konflik sosial dan agama yang ada dapat tertangani sehingga tidak pecah menjadi konflik. Upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang adalah meningkatkan deteksi dini adanya konflik di masyarakat dengan menempatkan personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang yang mempunyai kapasitas di bidang kewaspadaan dini di kecamatan. Personel tersebut bertugas sebagai intelijen yang melaporkan adanya potensi konflik sosial dan agama di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.

Agar tidak terjadi potensi konflik di masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengadakan berbagai pendidikan mulai dari pendidikan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, politik, penanganan masalah sosial kemasyarakatan, kewaspadaan dan deteksi dini konflik sosial, serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.

Tabel 2.8

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Berdasarkan SDGs

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	Orang	NA	24	20	20	25

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, 2025

Salah satu tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang adalah melakukan pendampingan kepada mantan pengguna narkoba yang telah menjalani rehabilitasi. Pendampingan tersebut berupa pemberian pelatihan hingga fasilitasi akses pekerjaan. Selama tahun 2020-2024, yang sudah mengakses layanan tersebut cenderung fluktuatif yaitu sebanyak 24 orang pada tahun 2021, sebanyak 20 orang pada tahun 2022 dan 2023, sebanyak 25 orang pada tahun 2024.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.9.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang

Uraian	Anggaran Pada Tahun (dalam ribuan)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (dalam ribuan)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.178.257	4.705.844	5.005.408	4.228.355	4.608.550	1.149.435	4.386.763	4.872.600	4.122.167	4.255.641	97,55	93,22	97,35	97,49	92,34	74,81	70,14
Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	1.212.200	1.242.718	848.505	1.586.910	1.176.200	1120354	1.179.351	834.724	1.586.899	1.175.590	92,42	94,90	98,38	100,00	99,95	7,98	10,06
Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	635370	1.602.389	1.176.008	4343223	68.175.035	634.847	1.597.106	1.169.241	4.342.995	68.073.884	99,92	99,67	99,42	99,99	99,85	466,15	465,92
Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	192.105	713.530	523.000	606.692	560.000	189.002	709.948	513361	606.453	509.274	98,38	99,50	98,16	99,96	90,94	63,26	62,51
Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	8.045	80.824	47.625	104.390	290.000	3.922	79.298	45.070	104.389	287.833	48,75	98,11	94,64	100,00	99,25	290,14	546,51
Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	2.518.280	791.242	210.359	533.700	260.800	2.517.301	711.882	209.333	533.700	250.691	99,96	89,97	99,51	100,00	96,12	9,85	10,10
Jumlah	**5.744.257**	**9.136.547**	**7.810.905**	**11.403.270**	**75.070.585**	**5.614.861**	**8.664.348**	**7.644.329**	**11.296.603**	**74.552.913**							
Rata-rata											**89,50**	**95,90**	**97,91**	**99,57**	**96,41**	**148,75**	**190,84**

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

Berdasar tabel 2.9, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu tahun 2020-2024 rasio antara realisasi dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang mengalami kenaikan, yaitu dengan rata-rata sebesar 89,50 pada tahun 2020 menjadi sebesar 96,41 pada tahun 2024, Hal ini berarti dana yang sudah dianggarkan terserap secara optimal. Besaran anggaran yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang selama kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 148,75%. Besaran realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2020-2024 juga cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 190,84%. Peningkatan anggaran menjadi salah satu pendorong dapat tercapainya target kinerja pelayanan sesuai dengan yang telah ditetapkan

2.4 Kelompok sasaran

Kelompok sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah berbagai elemen masyarakat yang menjadi fokus perhatian dan intervensi dalam upaya menjaga persatuan, kesatuan, dan stabilitas bangsa.

Kelompok-kelompok ini mencakup:

1. Umat Beragama : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupaya menjaga kerukunan antar umat beragama dan mencegah konflik berbasis agama.
2. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Partai Politik :Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ormas dan parpol agar berperan aktif dalam pembangunan dan menjaga stabilitas politik.
3. Kelompok Masyarakat Berdasarkan Etnis/Suku: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupaya menjaga kerukunan antar etnis/suku dan mencegah konflik berbasis SARA.
4. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Pemuda: Kelompok ini menjadi fokus pembinaan dan pemberdayaan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Aparatur Sipil Negara (ASN) : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga berperan dalam menjaga netralitas ASN dalam politik dan meningkatkan pemahaman tentang wawasan kebangsaan.
6. Penyelenggara Pemilu: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terlibat dalam menjaga stabilitas politik selama proses pemilu.
7. Masyarakat Umum: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya persatuan dan kesatuan, bela negara, serta wawasan kebangsaan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.5 Mitra Perangkat Daerah

Mitra perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah berbagai organisasi dan lembaga yang bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama di bidang pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, dan ketahanan nasional. Mitra ini bisa mencakup organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh agama, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah daerah lainnya.

2.6 Dukungan BUMD

Tidak ada Dukungan BUMD

2.7 Kerjasama Daerah

Tidak ada Kerjasama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan daerah lain.

.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.8 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

a. Permasalahan

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pemetaan permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.10.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Pemalang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam menjaga Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Belum adanya program kerja bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang sesuai kebutuhan
			Belum adanya kebijakan teknis bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang sesuai kebutuhan
			Masih banyak masyarakat yang belum mengikuti pendidikan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
			Belum optimalnya pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental
			Belum optimalnya pembinaan etnis
			Masih terjadi masalah dimasyarakat terkait ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
2	Masih rendahnya pemahaman masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap politik	Belum adanya program kerja bidang politik yang sesuai kebutuhan
			Belum adanya kebijakan teknis bidang politik yang sesuai kebutuhan
			Masih banyak masyarakat yang belum mengikuti pendidikan politik
			Masih rendahnya kemampuan partai politik dalam mengelola bantuan keuangan

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Masih terjadi permasalahan politik
			Dinamisnya kepengurusan partai politik
			Masih terjadi pelanggaran pemilu
3	Masih rendahnya keaktifan organisasi kemasyarakatan	Kurangnya peran organisasi kemasyarakatan dalam penanganan masalah sosial kemasyarakatan	Belum adanya program kerja bidang organisasi kemasyarakatan yang sesuai kebutuhan
			Belum adanya kebijakan bidang organisasi kemasyarakatan yang sesuai kebutuhan
			Dinamisnya kepengurusan organisasi kemasyarakatan
			Masih banyak organisasi kemasyarakatan yang belum paham penanganan masalah sosial kemasyarakatan
			Masih minimnya kecukupan sarana dan prasarana organisasi kemasyarakatan
			Masih terjadi permasalahan organisasi kemasyarakatan
4	Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kewaspadaan dan deteksi dini konflik sosial	Masih sedikit masyarakat yang paham kewaspadaan dan deteksi dini koflik sosial	Belum adanya program kerja bidang kewaspadaan nasional yang sesuai kebutuhan
			Masih minimnya aparatur daerah yang mempunyai kapasitas dibidang kewaspadaan dan deteksi dini
			Masih banyak masyarakat yang belum mengikuti pendidikan peningkatan kewaspadaan dan deteksi dini konflik sosial
			Masih terjadi potensi konflik sosial
			Adanya napiter yang perlu didampingi
			Masih terjadi unjuk rasa
			Masih terjadi permasalahan lintas sektor terkait kesatuan bangsa dan politik
5	Masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam menjaga	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketahanan	Belum adanya program kerja bidang ketahanan bangsa, pencegahan penyalahgunaan narkotika, kerukunan umat beragama dan peghayat

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	ekonomi, sosial dan budaya	kepercayaan yang sesuai kebutuhan
			Masih banyak masyarakat yang belum mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan bangsa
			Masih banyak masyarakat yang belum mengikuti fasilitasi pencegahan, penyalahgunaan narkotika
			Masih banyak masyarakat yang belum mengikuti fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan
			Masih terjadi penyalahgunaan narkotika
			Masih terjadi potensi konflik antar umat beragama
			Masih terjadi masalah di masyarakat terkait ketahanan bangsa, pencegahan penyalahgunaan narkotika, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan

b. Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, telaah visi misi dan program prioritas Bupati, telaah Renstra Kemendagri dan telaah Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah yang meliputi potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi pada periode sebelumnya, dirumuskan isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang yaitu:

1. Perlu ditingkatkannya kondusivitas wilayah;
2. Perlu ditingkatkannya Harmoni di aspek Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
3. Perlu ditingkatkannya kerukunan umat beragama;
4. Perlu ditingkatkannya kesadaran demokrasi di masyarakat.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.11

Isu Strategis Badan Kesatuan Bngsa dan Politik Kabupaten Pemalang

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1. Adanaya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 2. Adanya Kewaspadaan Dini Daerah (WASDINDA) 3. Adanya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 4. Adanya Tim MITWASDIN (Mitigasi dan kewaspadaan dini) 5. Data Ormas 6. Fungsi koordinasi	1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap partisipasi politik 3. Kurangnya peran organisasi kemasyarakatan dalam penanganan masalah sosial kemasyarakatan 4. Masih sedikit masyarakat yang paham kewaspadaan dan deteksi dini koflik sosial 5. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya 6. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja 7. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	1. Ketahanan dan Keamanan Lingkungan 2. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Masyarakat 3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	1. Isu Keamanan dan Stabilitas 2. Cyber Crime 3. Isu HAM 4. Isu Lingkungan Hidup	1. Ancaman Terorisme dan Radikalisme 2. Berita hoaks, ujaran kebencian, dan propaganda 3. Kebebasan berpendapat	1. Konflik SARA 2. Partisipasi dalam PEMILU 3. Pendidikan Politik 4. Isu Gender 5. Pembinaan Ormas	1. Perlu ditingkatkannya kondusivitas wilayah 2. Perlu ditingkatkannya Harmoni di aspek Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama 3. Perlu ditingkatkannya kerukunan umat beragama 4. Perlu ditingkatkannya kesadaran demokrasi di masyarakat

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan mampu bersaing dibidang kesatuan bangsa dan politik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan komprehensif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas dibidang kesatuan bangsa dan politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang secara proaktif berperan dalam mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakatmelalui peningkatan ketentraman dan ketertiban wilayah serta peningkatan solidaritas keagamaan.

1. Tujuan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang mempunyai 1 tujuan jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2025–2029, yaitu :

1. "**Meningkatnya Harmoni sosial, ekonomi, budaya dan keberagamaan dalam masyarakat**" yang diukur dengan indikator **Indeks Harmoni Indonesia.**

   Indeks Harmoni Indonesia adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat harmoni dan kerukunan antar kelompok sosial, budaya, dan agama di suatu wilayah. Penghitungan indeks ini dilakukan dengan menggabungkan nilai dari berbagai indikator yang mencerminkan tiga dimensi utama: persepsi masyarakat, partisipasi masyarakat, dan aksesibilitas terhadap layanan publik.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2. Sasaran

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang mempunyai 2 (dua) Sasaran jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2025–2029, yaitu :

1. **“Menurunnya potensi dan kejadian konflik SARA serta meningkatnya toleransi antar kelompok masyarakat”** yang diukur dengan indikator Jumlah Konflik SARA
2. **“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”** yang diukur dengan indikator kepuasan pelayanan kinerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**.**

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3. 1

Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(12)*
Meningkatnya daya saing pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya Harmoni sosial, ekonomi, budaya dan keberagamaan dalam masyarakat		Indeks Harmoni Indonesia	Angka	7,07	7,2	7,4	7.6	7.7	7.8	
Meningkatnya daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal		Menurunnya potensi dan kejadian konflik SARA serta meningkatnya toleransi antar kelompok masyarakat	Konflik SARA	Kasus	0	0	0	0	0	0	
		Meningkatnya pelayanan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Angka	87,30	87,50	87,90	88	88,20	88,50	

https://jdih.pemalangkab.go.id

3.2 Strategi dan Arah kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diatas maka pentahapan pembangunan Renstra Bakesbangpol di tiap Tahun sebagai berikut:

Tabel 3.2

Pentahapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Peningkatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	Peningkatan kerukunan antar suku, agama, ras dan golongan	Peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Penyelenggaraan politik dalam negeri yang demokratis dan fasilitasi ormas	Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai nilai pancasila dan wawasan kebangsaan

Tahun 2026 **Peningkatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama** Prioritas pembangunan renstra Tahap I tahun 2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan kondusivitas wilayah yang akan mendukung iklim investasi dan perekonomian daerah.
2. Memperkuat fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika
3. Penguatan nilai nilai Budaya dan agama
4. Pembinaan dan pemberdayaan ormas dalam menangani masalah sosial kemasyarakatan

Tahun 2027 **Peningkatan kerukunan antar suku, agama, ras dan antar golongan.** Prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Penguatan Pendidikan Karakter dan Toleransi
2. Memfasilitasi dialog antarumat beragama secara rutin untuk membangun pemahaman dan saling menghargai.
3. Peningkatan mitigasi terjadinya potensi konflik sosial dan konflik agama
4. Moderasi beragama

Tahun 2028 **Peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.** Prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Penguatan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)
2. Peningkatan komunikasi dan koordinasi antarpihak
3. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan konflik
4. Peningkatan Kerjasama Intelijen

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tahun 2029 **Penyelenggaraan politik dalam negeri yang demokratis dan fasilitasi ormas.** Prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses politik melalui pendidikan politik dan penyediaan wadah yang inklusif.
2. Penguatan kelembagaan dan kapasitas ormas agar dapat berperan aktif dalam pembangunan
3. Fasilitasi dialog dan komunikasi antara pemerintah, ormas, dan masyarakat untuk mencapai kesepahaman dan menyelesaikan masalah bersama.
4. Peningkatan peran aktif media dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mensukseskan tahapan pemilu

Tahun 2030 **Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai nilai pancasila dan wawasan kebangsaan** Prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Memperkuat identitas nasional
2. Penguatan peran media sosial dalam menyebarkan nilai-nilai kebangsaan, serta peningkatan pemahaman tentang nilai-nilai budaya Indonesia.
3. Pendidikan Pancasila yang Komprehensif dan berkelanjutan, tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga, masyarakat, dan tempat kerja.
4. Peningkatan rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.

Tabel 3.3

Arah Kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1		Peningkatan kondusivitas wilayah dengan peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama dan pemahaman wawasan kebangsaan;	Peningkatan Harmoni sosial, ekonomi, budaya dan agama dengan menurunnya potensi dan kejadian konflik SARA serta meningkatnya toleransi antar kelompok masyarakat	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.4

Sinergitas Program Asta cita, Program delegasi, Program prioritas Bupati dan wakil bupati, Program Nomenklatur Bakesbangpol

Program Asta cita	Program Delegasi	Program Prioritas Bupati	Program Bakesbangpol
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air	-	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
	Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air, dengan memperkuat forum kerukunan antar umat beragama	-	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029 :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
     a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
     b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
     c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
     d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
     e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
     f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
     g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
     a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
     b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
     c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
     d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
     e. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
   - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
     a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
     b. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

https://jdih.pemalangkab.go.id

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  a. Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
  b. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  c. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  d. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
  e. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  b. Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
  b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  c. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

https://jdih.pemalangkab.go.id

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
d. Pemeliharaan Mebel
e. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
f. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
g. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
h. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
   - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
     a. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
     b. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
     c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
     d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
     e. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
   - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

https://jdih.pemalangkab.go.id

a. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
b. Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
d. Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
e. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
  a. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran organisasi kemasyarakatan, Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, Evaluasi dan Mediasi Sengketa organisasi kemasyarakatan, Pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan Asing di Daerah
  b. Sub Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran organisasi kemasyarakatan, Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, Evaluasi dan Mediasi Sengketa organisasi kemasyarakatan, Pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan Asing di Daerah
  c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran organisasi kemasyarakatan, Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, Evaluasi dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Mediasi Sengketa organisasi kemasyarakatan, Pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan Asing di Daerah

d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran organisasi kemasyarakatan, Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, Evaluasi dan Mediasi Sengketa organisasi kemasyarakatan, Pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan Asing di Daerah
e. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran organisasi kemasyarakatan, Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, Evaluasi dan Mediasi Sengketa organisasi kemasyarakatan, Pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan Asing di Daerah

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
   - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
     a. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di DaerahSub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
     b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
     c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
     d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,

https://jdih.pemalangkab.go.id

Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

e. Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

6. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
  a. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
  b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
  c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
  d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang selama tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4. 1

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pemalang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya daya saing pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya Harmoni sosial, ekonomi, budaya dan keberagamaan dalam masyarakat				Indeks Harmoni Indonesia		
Meningkatnya daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal		Menurunnya potensi dan kejadian konflik SARA serta meningkatnya toleransi antar kelompok masyarakat	Terciptanya lingkungan sosial yang lebih harmonis, aman, dan sejahtera.	Jumlah kejadian konflik SARA	Konflik SARA		
		Meningkatnya pelayanan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peningkatan kepuasan masyarakat	Nilai IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kebijakan pemerintahan bidang adm. Umum		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) (skor) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (skor)	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
					Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

					tersusun		
					Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah dokumen RKA SKPD yang tersusun	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	
					Jumlah DPA SKPD yang tersusun	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	
					Jumlah perubahan DPA-SKPD yang tersusun	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD yang dilaksanakan (kali)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

https://jdih.pemalangkab.go.id

					Keuangan Akhir Tahun SKPD		
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
					Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
					Jumlah dokumen sarana dan prasarana disiplin pegawai yang tersusun	Peningkatan Saranadan Prasarana Disiplin Pegawai	
						Pengadaan PakaianDinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi (orang)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah barang milik daerah penunjang urusanpemerintah yang tersedia	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
					Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dibeli (unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan	Pengadaan Saranadan Prasarana Pendukung Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya	

https://jdih.pemalangkab.go.id

					lainnya yang disediakan		
					Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan JasaPeralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	
					Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaandan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah alat	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	

https://jdih.pemalangkab.go.id

					angkutan darat tak bermotor yang dipelihara (unit)	Pemeliharaandan Perizinan Alat Angkutan Darat TakBermotor	
					Jumlah mebel yang dipelihara (unit)	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara(unit)	Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya	
					Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang direhab/dipelihara (unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang direhab/dipelihara (unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantoratau BangunanLainnya	
					Peningkatan revolusi mental (%)	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	
					Jumlah aktivitas bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan dengan mantap (kegiatan)	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	
					Jumlah Program Kerja Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun (dokumen)	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, PembauranKebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah kebijakan teknis Bidang Ideologi Wawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, PembauranKebangsaan,	

https://jdih.pemalangkab.go.id

					Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun (dokumen)	Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di BidangIdeologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, PembauranKebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Paskibraka	Pembentukan Paskibraka	
					Meningkatnya pengetahuan politik masyarakat (%)	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	
					Jumlah aktivitas Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang dilaksanakan dengan mantap (kegiatan)	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

					Jumlah program kerja Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang disusun (dokumen)	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan SituasiPolitik di Daerah	
					Jumlah kebijakan teknis Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang disusun (dokumen)	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di BidangPendidikan Politik, Etika Budaya Politik, PeningkatanDemokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan SituasiPolitik Di Daerah	
					Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan SituasiPolitik Di Daerah	
					Jumlah orang yang mengikuti	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	

https://jdih.pemalangkab.go.id

					koordinasi Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang dilaksanakan	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan SituasiPolitik di Daerah	
					Jumlah laporan monitoring evaluasi pelanggaran pemilu yang tersussun (dokumen)	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan SituasiPolitik di Daerah	
					Terwujudnya organisasi kemasyarakatan yang berdaya (%)	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	
					Jumlah aktivitas bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat yang dilaksanakan dengan mantap (kegiatan)	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	
					Jumlah program kerja bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormasdan Ormas Asing di Daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

					Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun (dokumen)		
					Jumlah kebijakan bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun (dokumen)	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormasdan Ormas Asing diDaerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing diDaerah	
					Jumlah koordinasi bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang dilaksanakan (kegiatan)	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing diDaerah	
					Jumlah laporan monitoring evaluasi bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

					Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun (dokumen)	Ormas Asing di Daerah	
					Indeks kerukunan umat beragama (skor)	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	
					Jumlah aktivitas bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan dengan mantap (kegiatan)	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	
					Jumlah program kerja Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan yang disusun (dokumen)	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah kebijakan teknis Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan yang disusun (dokumen)	Pelaksanaan Kebijakan di BidangKetahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

					Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, FasilitasiKerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah laporan monitoring evaluasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan yang disusun (dokumen)	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Prosentase fasilitasi penanganan konflik sosial (%)	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	
					Jumlah aktivitas bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang dilaksanakan dengan mantap (kegiatan)	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	
					Jumlah program	Penyusunan Program Kerja di Bidang	

https://jdih.pemalangkab.go.id

					kerja Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik yang disusun (dokumen)	Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah kebijakan teknis Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik yang disusun (dokumen)	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah koordinasi Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik yang dilaksanakan (kegiatan)	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah laporan monitoring evaluasi Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	

https://jdih.pemalangkab.go.id

					Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik yang disusun (dokumen)	Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, sertaPenanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.2

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SAKIP IRB	65,55 69,01	67,25 69,35	4.028.916.000	67,50 70	4.028.916.000	67,80 73,45	4.028.916.000	70,35 75	4.028.916.000	72,25 77	4.028.916.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunya Dokumen Perencanaa,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		17 Dokumen	67.650.000	17 Dokumen	67.650.000	17 Dokumen	67.650.000	17 Dokumen	67.650.000	17 Dokumen	67.650.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	15.900.000	2 Dokumen	15.900.000	2 Dokumen	15.900.000	2 Dokumen	15.900.000	2 Dokumen	15.900.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Laporan	14.250.000	2 Laporan	14.250.000	2 Laporan	14.250.000	2 Laporan	14.250.000	2 Laporan	14.250.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 Laporan	17.500.000	6 Laporan	17.500.000	6 Laporan	17.500.000	6 Laporan	17.500.000	6 Laporan	17.500.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN		12 Bulan	3.065.266.000	12 Bulan	3.065.266.000	12 Bulan	3.065.266.000	12 Bulan	3.065.266.000	12 Bulan	3.065.266.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		17/12 Bulan	3.050.766.000	17/12 Bulan	3.050.766.000	17/12 Bulan	3.050.766.000	17/12 Bulan	3.050.766.000	17/12 Bulan	3.050.766.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		6 Laporan	14.500.000	6 Laporan	14.500.000	6 Laporan	14.500.000	6 Laporan	14.500.000	6 Laporan	14.500.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Tersusunya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**4 Laporan**	**1.000.000**	**4 Laporan**	**1.000.000**	**4 Laporan**	**1.000.000**	**4 Laporan**	**1.000.000**	**4 Laporan**	**1.000.000**	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		4 Laporan	1.000.000	4 Laporan	1.000.000	4 Laporan	1.000.000	4 Laporan	1.000.000	4 Laporan	1.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tersusunya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**4 laporan**	**5.000.000**	**4 laporan**	**5.000.000**	**4 laporan**	**5.000.000**	**4 laporan**	**5.000.000**	**4 laporan**	**5.000.000**	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		40 Orang	5.000.00	40 Orang	5.000.00	40 Orang	5.000.00	40 Orang	5.000.00	40 Orang	5.000.00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersusunya Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**133.000.000**		**133.000.000**		**133.000.000**		**133.000.000**		**133.000.000**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	1.000.000	4 Paket	1.000.000	4 Paket	1.000.000	4 Paket	1.000.000	4 Paket	1.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	5.000.000	4 Paket	5.000.000	4 Paket	5.000.000	4 Paket	5.000.000	4 Paket	5.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	40.000.000	12 Paket	40.000.000	12 Paket	40.000.000	12 Paket	40.000.000	12 Paket	40.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang		12 Paket	34.000.000	12 Paket	34.000.000	12 Paket	34.000.000	12 Paket	34.000.000	12 Paket	34.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

	Disediakan												
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		4 Dokumen	3.000.000	4 Dokumen	3.000.000	4 Dokumen	3.000.000	4 Dokumen	3.000.000	4 Dokumen	3.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**12 Layanan**	**587.000.000**	**12 Layanan**	**587.000.000**	**12 Layanan**	**587.000.000**	**12 Layanan**	**587.000.000**	**12 Layanan**	**587.000.000**	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	73.000.000	12 Laporan	73.000.000	12 Laporan	73.000.000	12 Laporan	73.000.000	12 Laporan	73.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	514.000.000	12 Laporan	514.000.000	12 Laporan	514.000.000	12 Laporan	514.000.000	12 Laporan	514.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			170.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		15 Unit	100.000.000	15 Unit	100.000.000	15 Unit	100.000.000	15 Unit	100.000.000	15 Unit	100.000.000	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		10 Unit	20.000.000	10 Unit	20.000.000	10 Unit	20.000.000	10 Unit	20.000.000	10 Unit	20.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		50 Unit	50.000.000	50 Unit	50.000.000	50 Unit	50.000.000	50 Unit	50.000.000	50 Unit	50.000.000	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				**611.675.000**		**611.675.000**		**611.675.000**		**611.675.000**		**611.675.000**	
Perumusan Kebijakan Teknis dan				**611.675.000**		**611.675.000**		**611.675.000**		**611.675.000**		**611.675.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan													
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		100 Orang	100.000.000	100 Orang	100.000.000	100 Orang	100.000.000	100 Orang	100.000.000	100 Orang	100.000.000	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		300 Orang	111.000.000	300 Orang	111.000.000	300 Orang	111.000.000	300 Orang	111.000.000	300 Orang	111.000.000	
Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka		75 Orang	200.675.000	75 Orang	200.675.000	75 Orang	200.675.000	75 Orang	200.675.000	75 Orang	200.675.000	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				**2.947.516.000**		**2.947.516.000**		**2.947.516.000**		**2.947.516.000**		**2.947.516.000**	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				**2.947.516.000**		**2.947.516.000**		**2.947.516.000**		**2.947.516.000**		**2.947.516.000**	
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan		11 Dokumen	20.000.000	11 Dokumen	20.000.000	11 Dokumen	20.000.000	11 Dokumen	20.000.000	11 Dokumen	20.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun												
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun		1 Dokumen	2.832.516.000	1 Dokumen	2.832.516.000	1 Dokumen	2.832.516.000	1 Dokumen	2.832.516.000	1 Dokumen	2.832.516.000	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		450 Orang	45.000.000	450 Orang	45.000.000	450 Orang	45.000.000	450 Orang	45.000.000	450 Orang	45.000.000	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN				**225.000.000**		**225.000.000**		**225.000.000**		**225.000.000**		**225.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN													
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**Jumlah Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun**			**225.000.000**		**225.000.000**		**225.000.000**		**225.000.000**		**225.000.000**	
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun		3 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	20.000.000	
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun		8 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	100.000.000	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		250 Orang	50.000.000	250 Orang	50.000.000	250 Orang	50.000.000	250 Orang	50.000.000	250 Orang	50.000.000	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		100 Orang	30.000.000	100 Orang	30.000.000	100 Orang	30.000.000	100 Orang	30.000.000	100 Orang	30.000.000	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,		12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	25.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

	Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah												
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA													
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				320.000.000		320.000.000		320.000.000		320.000.000		320.000.000	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		500 Orang	70.000.000	500 Orang	70.000.000	500 Orang	70.000.000	500 Orang	70.000.000	500 Orang	70.000.000	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		600 Orang	200.000.000	600 Orang	200.000.000	600 Orang	200.000.000	600 Orang	200.000.000	600 Orang	200.000.000	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				199.325.000		199.325.000		199.325.000		199.325.000		199.325.000	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan				199.325.000		199.325.000		199.325.000		199.325.000		199.325.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial													
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		100 Orang	45.000.000	100 Orang	45.000.000	100 Orang	45.000.000	100 Orang	45.000.000	100 Orang	45.000.000	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		2 Laporan	65.000.000	2 Laporan	65.000.000	2 Laporan	65.000.000	2 Laporan	65.000.000	2 Laporan	65.000.000	
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		12 Dokumen	89.325.000	12 Dokumen	89.325.000	12 Dokumen	89.325.000	12 Dokumen	89.325.000	12 Dokumen	89.325.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Tabel 4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
2	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional Dan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Bakesbangpol Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	IHAI (Indeks Harmoni Indonesia)	Angka	7,07	7,2	7,4	7.6	7.7	7.8	
2	Konflik SARA	Kasus	0	0	0	0	0	0	
3	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Angka	87,30	87,50	87,90	88	88,20	88,50	

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kasus	0	0	0	0	0	0	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik untuk periode tahun 2025 – 2029 dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pemalang yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029. Sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemendagri dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politikdan/atau target kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LkjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang. Laporan Kinerja (LkjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang ini.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 221 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Dengan terlayaninya berbagai kebutuhan administrasi masyarakat diharapkan dapat memperlancar berbagai urusan masyarakat. Kecamatan juga melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sehingga pemerintahan desa dapat lebih optimal dalam memajukan desanya dan menyejahterakan masyarakatnya. Agar tujuan tersebut dapat tercapai harus didukung oleh perencanaan yang baik sehingga perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

Kecamatan Pemalang sebagai salah satu PD harus menyusun Renstra. Penyusunan Renstra Kecamatan Pemalang sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kecamatan Pemalang di samping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kementerian dan Renstra PD Kabupaten Pemalang yang terkait.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Pemalang untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Pemalang serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Renstra menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Pemalang selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas

https://jdih.pemalangkab.go.id

penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan pelayanan publik yang baik dan mewujudkan masyarakat desa/kelurahan yang berdaya.

Penyusunan Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Kecamatan Pemalang, di mana kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Pemalang harus mendukung kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai.

Proses penyusunan Renstra meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1) Persiapan Penyusunan Renstra PD, terdiri dari pembentukan tim penyusun Renstra PD, orientasi mengenai Renstra PD, agenda kerja tim penyusun Renstra PD, penyiapan data dan informasi; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD; (3) Penyusunan Rancangan Renstra PD; (4) Forum Perangkat Daerah; (5) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD; dan (6) Penetapan Renstra PD. Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 disajikan dalam bagan berikut :

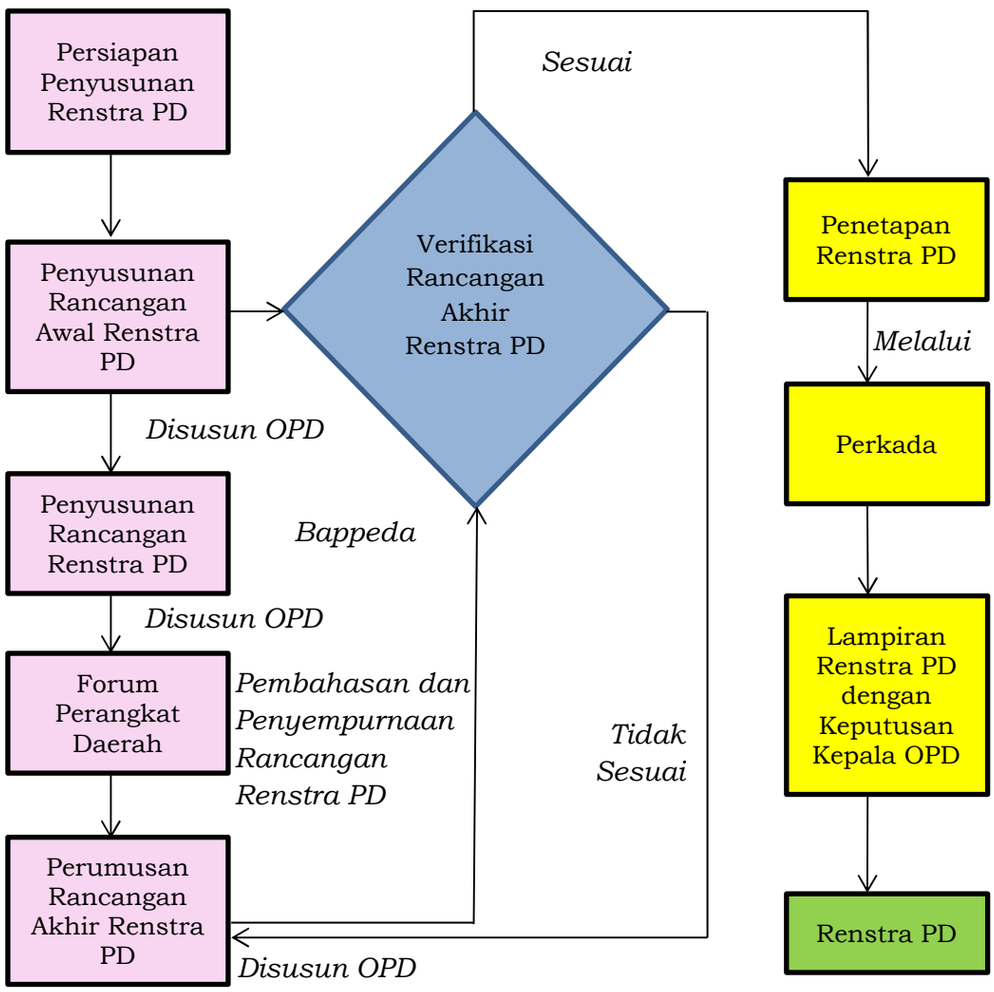

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah)

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dokumen Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang. Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut :

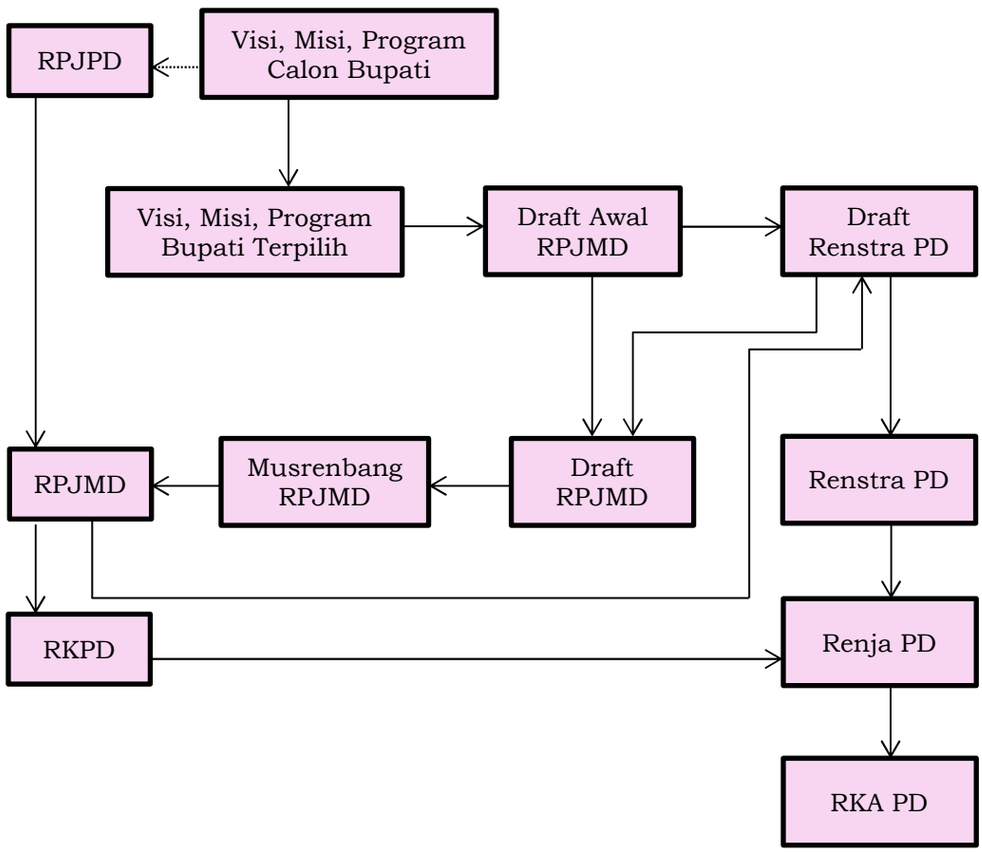

Gambar 1.2
Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimanation Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

https://jdih.pemalangkab.go.id

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

https://jdih.pemalangkab.go.id

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;

https://jdih.pemalangkab.go.id

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029;
36. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
37. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
38. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 adalah :

1. Sebagai penjabaran atas RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pemalang ;
2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Pemalang selama kurun waktu 5 tahun (2025-2029).

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pemalang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah di Unsur Kewilayahan;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pemalang setiap tahunnya;
3. Menjadi acuan kerja resmi bagi Kecamatan Pemalang serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Unsur Kewilayahan;
4. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Kecamatan Pemalang.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025 - 2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Pemalang, berisi tugas, fungsi dan struktur organisai Kecamatan Pemalang, sumber daya Kecamatan Pemalang, kinerja pelayanan Kecamatan Pemalang, kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Pemalang, permasalahan pelayanan Kecamatan Pemalang berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dan isu strategis Kecamatan Pemalang.
3. Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan berisi tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan kebijakan Kecamatan Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025-2029.
4. Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, berisi uraian program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator, kinerja, target, dan pagu indikatif Kecamatan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah dan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), target kinerja penyelenggaraan

https://jdih.pemalangkab.go.id

urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indicator kinerja kunci (IKK).

5. Bab V Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Kecamatan Pemalang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Pemalang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

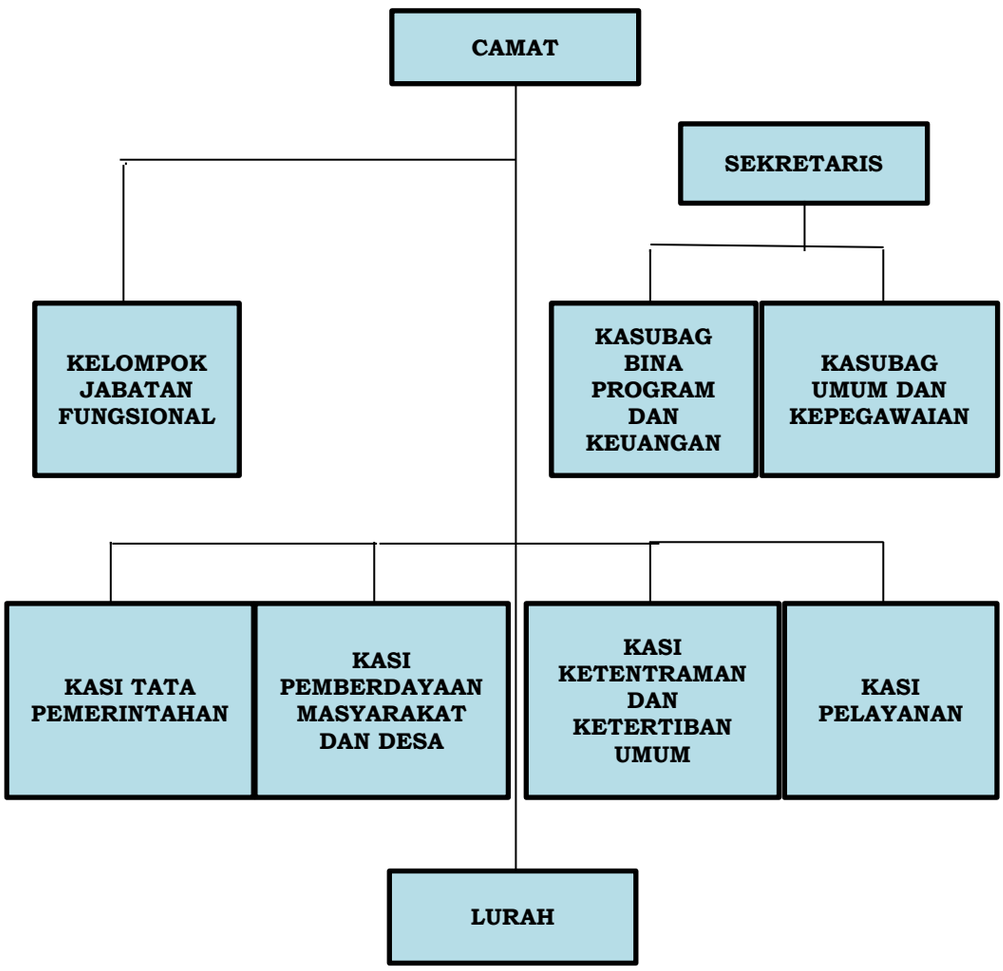

Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Kecamatan Pemalang

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan,

https://jdih.pemalangkab.go.id

pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

A. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Camat mempunyai uraian tugas :

1. Mengarahkan penyusunan dokumen perencanaan kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan organisasi, perencanaan partisipatif dan perencanaan yang lebih tinggi dan ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Merumuskan kebijakan kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Merumuskan inovasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
4. Mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan kecamatan, meliputi kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan umum dan kesekretariatan sesuai dengan tugas fungsi dan pedoman pelaksanaan agar tepat sasaran dan tujuan;
5. Mengarahkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan dengan melalui bimbingan, supervisi, fasilitasi dan evaluasi guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan;
6. Mengarahkan penyediaan dan pelayaan informasi publik serta penyusunan data dan informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;

https://jdih.pemalangkab.go.id

7. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsinya guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh PD kabupaten yang ada di kecamatan sesuai dengan petunjuk pimpinan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
9. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan Peraturan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
10. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Merumuskan laporan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kerja organisasi.

B. Sekretaris Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan kesekretariatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian sesuai dengan kebituhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
5. Mengoordinasikan penyusunan kondep inovasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan seluruh seksi dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

subbagian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;

6. Mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
9. Melaksanakan tugas dan kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

a. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :

1) Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2) Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3) Menyusun konsep dokumen perencanaan Kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan oprganisasi, perencanaan partisipatif, dan perencanaanyang lebih tinggi guna dirumuskan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
4) Menyusun konsep laporan capaian kinerja Kecamatan yang meliputi LKjIP, laporan pelaksanaan APBD dan laporan kinerja lain berdasarkan Renja dan realisasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban;
5) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib adminstrasi;
6) Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan keuangan;
7) Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi LRA, LO, LPE, neraca dan CaLK serta laporan keuangan

https://jdih.pemalangkab.go.id

lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;

8) Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9) Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
10) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kecamata sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepasa pimpinan; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

1) Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2) Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai sengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3) Mengelola kegiatan administrasi surat menyurat, kepegawaian, penataan arsip, dokumentas, dan kearsipan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
4) Mengelola kegiatan kerumahtanggaan meliputi penyediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, pelayanan tamu dinas dan fasilitasi penyelenggaraan

https://jdih.pemalangkab.go.id

rapat dinas sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

5) Mengelola administrasi barang milik daerah yang meliputi penyusunan analisa kebutuhan dan pemeliharaan barang, penatausahaan barang, dan penyusunan administrasi barang lainnya sesuai dengan peraturan pengelolaan barang milik daerah guna tertib administrasi;
6) Mengelola kegiatan ketatalaksanaan meliputi penyusunan standart dan prosedur kerja sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
7) Mengelola kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi penyediaan dan pelayanan informasi publik, penyusunan data informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian, pengaturan tata tempat dan tata acara serta kegiatan kehumasan dan keprotokolan lain sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
8) Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

C. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

https://jdih.pemalangkab.go.id

3. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta, dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan memeriksa berkas yang diajukan kepala desa sebagai bahan konsultasi kepada pimpinan guna disahkan oleh pimpinan;
5. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan melalui fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, fasilitasi pemberian tunjangan perangkat desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;
6. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Seksi Tata Pemerintahan meliputi data monografi desa, data perangkat desa dan data terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
8. Menyusun konsep motivasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

D. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kabupaten Pemalang, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, keagamaan, pembinaan kesehatan, keluarga berencana, organisasi perempuan, pendidikan, pemuda dan olahraga dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan sosial desa melalui fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pembangunan desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjaama desa dengan pihak ketiga, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, koordinasi pendampingan desa, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial guna tertib administrasi dan kelancaran dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dengan melibatkan stakeholder terkait demi tercapainya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran;
6. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan rencana

https://jdih.pemalangkab.go.id

program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan dan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawabkan kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

E. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan meliputi fasilitasi pengaduan masyarakat, kejadian musibag, bencana umum atau kejadian luar biasa lainnya serta upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lainnya dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan pemuka agama/tokoh masyarakat serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau desa/kelurahan serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna tegaknya peraturan;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah yang ada di wilayah kecamatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dan/atau swasta dan/atau pihak terkait lainnya sesuai dengan prosesur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keamanan dan terpeliharanya prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah;
6. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

lembaga-lembaga desa dan kelurahan yang bergerak di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;

7. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kebutuhan informasi publik;
9. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

F. Kepala Seksi Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Kepala Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan kegiatan koordinasi terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan dan kabupaten, pemerintah desa/kelurahan, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep rencana operasional dan standar pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan;

https://jdih.pemalangkab.go.id

5. Melaksanakan kegiatan fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan di bidang perizinan, non perizinan, administrasi pertanahan dan pelayanan administrasi lainnya sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dan pemeriksaan dokumen/berkas permohonan, cek lokasi apabila disyaratkan, pengesahan hingga penyampaian kembali dokumen/berkas kepada pemohon guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
6. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan prosedur dan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
7. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tercapainya kepuasan masyarakat;
8. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
9. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
10. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya Kecamatan Pemalang sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

1. Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

   Pada awal Tahun 2025 Jumlah pegawai di Kecamatan Pemalang dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyakatan sosial adalah sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

a. Jumlah pegawai menurut jenisnya :
   1) PNS : 83 orang
   2) Non PNS : 102 orang

b. Jumlah pegawai PNS menurut pendidikan

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai PNS menurut Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	SD	1	0	1
2	SMP	1	0	1
3	SMA	13	9	22
4	D III / D II	2	1	3
5	D IV	2	1	3
6	Sarjana (S1)	23	18	41
7	Pasca Sarjana (S2)	8	4	12
Total		**50**	**33**	**83**

c. Jumlah pegawai PNS menurut golongan

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai PNS menurut Golongan

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	II/a	3	0	3
2	II/b	4	0	4
3	II/c	3	3	6
4	II/d	6	4	10
5	III/a	8	11	19
6	III/b	7	4	11
7	III/c	9	4	13
8	III/d	10	7	17
Total		**50**	**33**	**83**

2. Sarana dan Prasarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Kecamatan Pemalang dan 7 Kelurahan se-Kecamatan Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.3.
Inventaris Aset Kecamatan Pemalang

NO	GOL	KODE BID. BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH HARGA (Rp)
1	**1**		**Tanah**	
		1	Tanah Kecamatan Pemalang	926.000.000
		1	Tanah Kelurahan Mulyoharjo	70.730.350.600
		1	Tanah Kelurahan Widuri	5.028.120.000
		1	Tanah Kelurahan Kebondalem	14.102.694.300
		1	Tanah Kelurahan Pelutan	28.215.881.000
		1	Tanah Kelurahan Sugihwaras	2.171.991.000
		1	Tanah Kelurahan Paduraksa	906.840.750
		1	Tanah Kelurahan Bojongbata	22.711.509.000
			Jumlah KIB A	**144.793.386.650**
2	**2**		**Peralatan dan Mesin**	
			Kecamatan Pemalang	
		1	Alat-alat Besar	5.500.000
		2	Alat-alat Angkutan	560.933.028
		3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.400.000
		5	Alat Kantor & Rumah Tangga	481.940.690
		6	Alat Studia & Alat Komunikasi	24.071.570
		7	Alat-alat Kedokteran	1.600.000
		10	Komputer	310.885.240
			Kelurahan Mulyoharjo	
		1	Alat-alat Besar	15.190.000
		2	Alat-alat Angkutan	106.568.000
		5	Alat Kantor & Rumah Tangga	192.610.552
		6	Alat Studia & Alat Komunikasi	8.007.000
		7	Alat-alat Kedokteran	4.590.000
		10	Komputer	117.150.000
			Kelurahan Widuri	
		1	Alat-alat Besar	27.044.000
		5	Alat Kantor & Rumah Tangga	149.717.652
		6	Alat Studia & Alat Komunikasi	5.800.000
		10	Komputer	152.492.500
		19	Peralatan Olah Raga	18.000.000
			Kelurahan Kebondalem	
		1	Alat-alat Besar	10.000.000
		2	Alat-alat Angkutan	117.574.000
		4	Alat Pertanian	4.200.000
		5	Alat Kantor & Rumah Tangga	137.632.527
		6	Alat Studia & Alat Komunikasi	2.260.000
		8	Alat Laboratorium	9.500.000
		10	Komputer	130.591.275
			Kelurahan Pelutan	
		2	Alat-alat Angkutan	27.044.000
		5	Alat Kantor & Rumah Tangga	199.315.829

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	GOL	KODE BID. BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH HARGA (Rp)
		6	Alat Studia & Alat Komunikasi	16.100.000
		7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.000.000
		10	Komputer	132.287.500
		18	Rambu-rambu	60.000.000
			Kelurahan Sugihwaras	
		1	Alat-alat Besar	7.190.000
		2	Alat-alat Angkutan	27.044.000
		3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	780.000
		4	Alat Pertanian	2.230.000
		5	Alat Kantor & Rumah Tangga	93.617.134
		6	Alat Studia & Alat Komunikasi	5.000.000
		10	Komputer	38.284.786
			Kelurahan Paduraksa	
		1	Alat-alat Besar	10.500.000
		2	Alat-alat Angkutan	32.544.000
		5	Alat Kantor & Rumah Tangga	193.511.279
		6	Alat Studia & Alat Komunikasi	7.815.000
		7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.400.000
		10	Komputer	125.846.700
		19	Peralatan Olah Raga	9.800.000
			Kelurahan Bojongbata	
		1	Alat-alat Besar	9.850.000
		2	Alat-alat Angkutan	27.044.000
		5	Alat Kantor & Rumah Tangga	170.915.652
		6	Alat Studia & Alat Komunikasi	6.000.000
		7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.995.000
		10	Komputer	119.482.400
			Jumlah KIB B	**3.925.855.314**
3	**3**		**Gedung dan Bangunan**	
			Kecamatan Pemalang	
		1	Bangunan Gedung	1.743.873.650
		2	Monumen	272.935.000
		4	Tugu kontrol	200.000.000
			Kelurahan Mulyoharjo	
		1	Bangunan Gedung	739.856.000
		4	Tugu kontrol	28.317.000
			Kelurahan Widuri	
		1	Bangunan Gedung	564.295.500
			Kelurahan Kebondalem	
		1	Bangunan Gedung	551.362.000
		4	Tugu kontrol	27.643.000
			Kelurahan Pelutan	
		1	Bangunan Gedung	732.213.500
		4	Tugu kontrol	149.950.000
			Kelurahan Sugihwaras	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	GOL	KODE BID. BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH HARGA (Rp)
		1	Bangunan Gedung	1.102.481.799
			Kelurahan Paduraksa	
		1	Bangunan Gedung	1.285.194.625
			Kelurahan Bojongbata	
		1	Bangunan Gedung	981.275.200
		2	Monumen	5.000.000
		4	Tugu kontrol	485.598.500
			Jumlah KIB C	**8.869.995.774**
4	**4**		**Jalan, Irigasi dan Jaringan**	
			Kecamatan Pemalang	
		3	Instalasi	1.000.000
		4	Jaringan	33.349.325
			Kelurahan Mulyoharjo	
		1	Jalan & Jembatan	1.697.223.562
		2	Bangunan Air	332.417.000
		3	Instalasi	500.000
		4	Jaringan	1.500.000
			Kelurahan Widuri	
		1	Jalan & Jembatan	1.114.612.233
		2	Bangunan Air	367.705.500
		3	Instalasi	825.000
		4	Jaringan	40.136.000
			Kelurahan Kebondalem	
		1	Jalan & Jembatan	1.446.121.452
		2	Bangunan Air	369.867.055
		3	Instalasi	500.000
		4	Jaringan	6.000.000
			Kelurahan Pelutan	
		1	Jalan & Jembatan	576.820.740
		2	Bangunan Air	1.190.983.126
			Kelurahan Pelutan	
		1	Jalan & Jembatan	481.639.000
		2	Bangunan Air	219.030.611
		4	Jaringan	13.468.325
			Kelurahan Paduraksa	
		1	Jalan & Jembatan	1.155.943.196
		2	Bangunan Air	729.254.500
		4	Jaringan	1.300.000
			Kelurahan Bojongbata	
		1	Jalan & Jembatan	1.895.350.451
		2	Bangunan Air	153.550.000
		3	Instalasi	400.000
			Jumlah KIB D	**11.829.497.076**
5	**5**		**Aset Tetap Lainnya**	
			Kecamatan Pemalang	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	GOL	KODE BID. BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH HARGA (Rp)
		1	Buku dan Perpustakaan	8.891.500
		2	Barang Bercorak Kebudayaan	185.000
			Kelurahan Mulyoharjo	
		1	Buku dan Perpustakaan	21.524.250
		2	Barang Bercorak Kebudayaan	1.150.000
			Kelurahan Widuri	
		2	Barang Bercorak Kebudayaan	125.000
			Kelurahan Kebondalem	
		2	Barang Bercorak Kebudayaan	165.000
			Kelurahan Pelutan	
		2	Barang Bercorak Kebudayaan	418.000
			Kelurahan Sugihwaras	
		1	Bahan Pustakaan	3.340.000
		2	Barang Bercorak Kebudayaan	10.080.000
			Kelurahan Paduraksa	
		1	Buku dan Perpustakaan	21.524.250
		2	Barang Bercorak Kebudayaan	1.098.000
			Kelurahan Bojongbata	
		2	Barang Bercorak Kebudayaan	353.250
			Jumlah KIB E	**68.854.250**
6	**6**		**Konstruksi dalam Pengerjaan**	**0**
			Jumlah KIB F	**0**
			Jumlah Total	**169.487.589.064**

Sumber : Sekretariat Kecamatan Pemalang, 2025

Berdasar tabel 2.3., sarana dan prasarana perkantoran yang dimiliki oleh Kecamatan Pemalang masih ada barang inventaris perlu dilakukan pengadaan seperti computer dan kelengkapannya, peralatan/ perlengkapan kantor untuk mengganti barang inventais yang rusak, pengadaan kendaraan dinas, pagar depan Kecamatan Pemalang yang sudah miring, gedung kantor/bangunan lainnya yang kondisinya sudah memprihatinkan misalnya gedung/bangunan di kelurahan Kebondalem, Sugihwaras yang perlu di rehab dan Gedung Kelurahan lainnya / kecamatan yang perlu membutuhkan pemeliharaan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Administrasi Kewilayahan

Terdapat 20 desa/kelurahan di Kecamatan Pemalang dengan perincian sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.4.
Administrasi Kewilayahan Kecamatan Pemalang

NO	DESA / KELURAHAN	JUMLAH DUSUN	JUMLAH RW	JUMLAH RT	JUMLAH PERANGKAT DESA	JUMLAH LINMAS
1	BANJARMULYA	7	14	50	11	82
2	BOJONGNANGKA	2	10	52	13	14
3	DANASARI	5	8	21	11	40
4	KRAMAT	2	2	14	10	22
5	LAWANGREJO	2	4	15	10	14
6	MENGORI	4	4	29	12	26
7	PEGONGSORAN	3	3	27	10	20
8	SARADAN	3	3	15	9	15
9	SEWAKA	6	12	32	14	28
10	SUNGAPAN	3	6	25	11	13
11	SURAJAYA	4	10	52	11	32
12	TAMBAKREJO	4	7	40	10	29
13	WANAMULYA	4	4	23	11	20
14	BOJONGBATA	14	19	85	3	65
15	KEBONDALEM	7	12	65	9	10
16	MULYOHARJO	7	24	111	21	58
17	PADURAKSA	5	8	34	20	34
18	PELUTAN	0	12	80	12	100
19	SUGIHWARAS	7	16	51	13	9
20	WIDURI	0	8	32	16	30
JUMLAH		**89**	**186**	**853**	**237**	**661**

Sumber : Kecamatan Pemalang Tahun 2025

Kecamatan Pemalang terdiri dari 13 desa dan 7 kelurahan, 853 RT dan 186 RW, 237 Perangkat Desa Untuk menjaga ketentraman dan ketertiban wilayah, Kecamatan didukung oleh 661 personil Linmas.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran kinerja pelayanan Kecamatan Pemalang Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.5. dan Tabel 2.6. berikut :

1. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pemalang berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Program Kegiatan Kecamatan Pemalang.

   Kinerja Pelayanan Kecamatan Pemalang berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Program Kegiatan Kecamatan Pemalang dari tahun 2021 – 2024 kinerjanya semakin meningkat bahkan ada beberapa indikator yang melebihi dari target yang telah di tentukan, Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pemalang pada Tahun 2021 – 2024 dapat dilihat di Tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pemalang berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Program Kegiatan Kecamatan Pemalang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian Pada Tahun			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan	Indeks				83,4	83,45	83,50	83,55	83,25	84,39	85,66	86,39	99,82	100	102,58	103,39
2	Cakupan Layanan Masyarakat	%				86,99	88,53	88,53	90,07	86,99	88,53	91,16	96,92	100	101,13	103,47	109,10
3	Persentase pelayanan publik yang tesedia	%				81,11	81,11	81,11	81,11	81,11	81,11	81,11	100	100	100	100	100
4	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian Pada Tahun			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
6	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%				53,84	61,53	61,53	69,23	53,84	61,53	76,92	84,62	100	100	125,02	122,23

Sumber : Kecamatan Pemalang, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

Berdasarkan tabel 2.5., dapat diketahui pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pemalang selama tahun 2021-2026 sebagai berikut :

a. Melebihi target, meliputi :
   - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kecamatan,
   - Cakupan layanan masyarakat
   - Persentase desa bertata kelola yang baik

   Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :
   1) Komitmen dari semua pihak;
   2) Sarana dan prasarana yang mendukung kinerja;
   3) Dilaksanakan Bimbingan Teknis atau Pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
   4) Adanya reward bagi pegawai yang rajin dan bekerja sesuai target sehingga akan memotivasi bagi pegawai lainnya untuk bekerja lebih giat mencapai target
   5) Komunikasi dan Koordinasi yang intens antar instansi

b. Memenuhi target, meliputi :
   - Persentase pelayanan publik yang tersedia
   - Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif
   - Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani

   Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :
   1) Komitmen dari semua pihak;
   2) Sarana dan prasarana yang mendukung kinerja;
   3) Dilaksanakan Bimbingan Teknis atau Pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
   4) Adanya reward bagi pegawai yang rajin dan bekerja sesuai target sehingga akan memotivasi bagi pegawai lainnya untuk bekerja lebih giat mencapai target
   5) Komunikasi dan Koordinasi yang intens antar instansi

c. Tidak memenuhi Target, Pada Tahun 2021 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan nilainya selisih 0,18 dibandingkan dengan target IKM di Tahun 2021, Targetnya 83,4 Realisasi 83,25.Hal ini disebabkan pada ada nilai yang kurang pada waktu pelayanan. Waktu pelayanan Kecamatan Pemalang sudah sesuai dengan Standar Pelayanan, tetapi waktu pelayanan bisa menjadi lebih lama dikarenakan pemohon pada saat datang mengajukan permohonan ada syarat yang belum dipenuhi,sehingga pemohon beranggapan waktu pelayanan menjadi lama.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pemalang sesuai Bab II RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026

Kinerja Pelayanan Kecamatan Pemalang berdasarkan Indikator Kinerja sesuai dengan Bab II RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026 Kecamatan Pemalang dari tahun 2021 – 2024 kinerjanya semakin meningkat. Untuk indikator jumlah potensi konflik Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pemalang pada Tahun 2021 – 2024 dapat dilihat di Tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.6.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pemalang
sesuai Bab II RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani	%	100	100	100	100	100
2	Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	%	43,33	43,33	46,67	46,67	66,67
3	Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan	%	100	100	100	100	100
4	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100
5	Persentase jalan kewenangan kelurahan kondisi baik	%	65,22	38,52	50,95	59	60
6	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	%	100	100	100	100	100
7	Jumlah potensi konflik	kasus	0	0	2	0	0
8	Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik	%	53,84	53,84	61,53	76,92	84,62

Sumber : Kecamatan Pemalang, 2025

Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani selama kurun waktu tahun 2020-2024 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada pengaduan masyarakat di kecamatan dapat ditangani dengan baik dan tepat waktu.

Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020 - 2024 semakin meningkat, yaitu sebesar 43,33% pada tahun 2020 menjadi sebesar 66,67% pada tahun 2024. Hal tersebut disebabkan Meningkatnya Kinerja Kecamatan Pemalang dalam melaksanakan

https://jdih.pemalangkab.go.id

pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dan ini merupakan komitmen bersama seluruh pegawai Kecamatan Pemalang dan adanya koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah terkait .

Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2020-2024 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa ada kepedulian tinggi dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang diselenggarakan mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai kecamatan.

Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi selama kurun waktu tahun 2020 - 2024 sebesar 100%. Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan merupakan mitra kecamatan dalam pembangunan kecamatan sehingga perlu untuk difasilitasi kegiatannya.

Persentase jalan kewenangan kelurahan kondisi baik dalam kurun waktu tahun 2021- 2024 cenderung meningkat, yaitu sebesar 38,52% pada tahun 2021 menjadi sebesar 60% pada tahun 2024. Meskipun cenderung meningkat dari tahun ke tahun, capaian tersebut masih jauh dari target yang diharapkan. Kondisi tersebut disebabkan masih minimnya dana kelurahan yang dialokasikan dan masih kurangnya dukungan dari Perangkat Daerah terkait.

Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani selama kurun waktu tahun 2020- 2024 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada gangguan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan dapat ditangani dengan baik.

Pada tahun 2020 - 2024 masih terdapat potensi konflik di Tahun 2022, pada tahun – tahun berikutnya tidak terdapat potensi konfik. Potensi yang menimbulkan konflik di masyarakat sudah dapat diatasi di lingkungan masyarakat terkecil, hal ini terjadi karena meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menyikapi hal – hal yang bisa berpotensi menimbulkan konflik. Kesadaran masyarakat dalam memelihara persatuan, kesatuan dan kenyamanan bermasyarakat semakin meningkat

Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik dalam kurun waktu tahun 2020 - 2024 cenderung meningkat, yaitu sebesar 53,84% pada tahun 2020 menjadi sebesar 84,62% pada tahun 2024. Hal ini terjadi karena meningkatnya pelayanan Kecamatan Pemalang dalam memfasilitasi Tata Kelola Pemerintahan Desa, sehingga bisa meningkatkan kesadaran Desa untuk memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan agar bertata kelola yang baik.

3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pemalang berdasarkan SDGs

SDGs (Sustainable Development Goals) adalah 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang disepakati oleh negara – negara anggota PBB sebagai agenda global untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan perdamaian dan kemakmuran bagi semua orang pada tahun 2030. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

https://jdih.pemalangkab.go.id

yang dilaksanakan Kecamatan Pemalang tidak mendukung secara langsung dalam pelaksanaan SDGs sehingga capaian kinerja Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang berdasarkan SDGs Tahun 2020 – 2024 adalah NIHIL

Tabel 2.7.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Berdasarkan SDGs

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	NIHIL					
2						
3						

Sumber : Kecamatan Pemalang, 2025

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan meliputi seluruh warga masyarakat yang berada dalam wilayah Kecamatan Pemalang, termasuk :

1 Warga negara Indonesia yang memiliki KTP dan KK Wilayah Kecamatan Pemalang
2 Penduduk asing yang memilik izin tinggal di Wilayah Kecamatan Pemalang
3 Organisasi Masyarakat (Ormas), Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha yang berdomisili di Wilayah Kecamatan Pemalang
4 Institusi pemerintahan di tingkat Kecamatan Pemalang seperti Kelurahan, RT, RW dan lembaga kemasyarakatan desa

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Pemalang

2.2.1 Permasalahan Kecamatan Pemalang Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Kecamatan Pemalang sebagai PD mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Pemalang dapat dilihat dalam tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.8.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pemalang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia	Masih terbatasnya jenis data pemerintahan yang dipublikasikan	Masih rendahnya disiplin ASN dalam mengarsipkan data
			Rendahnya kompetensi ASN
			Terbatasnya SDM
2	Belum optimalnya desa bertata kelola pemerintahan baik	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Masih banyak desa yang belum mampu melaksanakan administrasi tata pemerintahan desa dengan tertib sehingga perlu pembinaan dan pengawasan yang lebih optimal
			Belum optimalnya pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa sehingga perlu pembinaan dan pengawasan yang lebih optimal
			Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sehingga perlu pembinaan dan pengawasan yang lebih optimal
3	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja	Belum tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan PD
			Belum optimalnya penyusunan dokumen penganggaran PD
			Belum optimalnya penyusunan laporan evaluasi kinerja PD
		Belum optimalnya pengadministrasian keuangan	Belum optimalnya Bendahara dalam meng SPJ kan Pengeluaran
			Belum optimalnya Bendahara dan Pejabat Pengelola Keuangan perangkat daerah terhadap Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah
			Belum optimalnya penyusunan laporan keuangan PD
4	Belum meratanya pembangunan di Wilayah Kecamatan Pemalang	Belum optimalnya bantuan sosial masyarakat	Data penerima bantuan sosial tidak akurat menyebabkan distribusi bansos belum tepat sasaran
		Infrastruktur yang belum merata	Masih terbatasnya anggaran untuk infrastruktur terutama di Kelurahan
			Pengelolaan sampah yang tidak di Kelola dengan baik
			Masih banyak jalan yang rusak di wilayah Kecamatan Pemalang

2.2.2 Isu Strategis Kecamatan Pemalang

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berlangsung dalam jangka menengah / panjang (Permendagri 86 tahun 2017). Isu strategis Kecamatan Pemalang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu strategis global, Nasional dan Provinsi dan memperhatikan potensi, peluang dan tantangan yang ada di Kecamatan Pemalang selama kurun waktu tahun 2025 – 2029. Isu strategis Global, Nasional dan Provinsi Jawa Tengah dan Isu strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pemalang untuk Kecamatan Pemalang adalah sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.9.
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pelayanan Publik	Belum optimalnya pelayanan publik dan masih kurangnya SDM yang kompeten	Belum optimalnya kontribusi sector ekonomi unggulan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah	Pendidikan	Ketimpangan antar Wilayah Jawa dan Luar jawa masih tinggi	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Pelayanan Publik berbasis digitalisai
Pembinaan dan Pengawasan tata kelola Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Belum optimalnya penataan desa	Belum optimalnya kontribusi sector ekonomi unggulan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah	Pendidikan	Ketimpangan antar Wilayah Jawa dan Luar jawa masih tinggi	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Reformasi tata Kelola pemerintahan Desa/ Kelurahan
Akuntabilitas kinerja	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja	Belum optimalnya kontribusi sector ekonomi unggulan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah	Pendidikan	Ketimpangan antar Wilayah Jawa dan Luar jawa masih tinggi	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Akuntabilitas Kinerja yang semakin baik
Sarana dan Prasana Kelurahan/ Desa	Belum meratanya pembangunan di wilayah Kecamatan Pemalang					Pemerataan pembangunan di Wilayah Kecamatan Pemalang sebagai akselerasi pengentasan kemiskinan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa setelah mempertimbangkan berbagai Isu strategis global, nasional, provinsi Jawa Tengah, Isu strategis Kecamatan Pemalang untuk lima tahun kedepan di fokuskan pada :

1. Pelayanan Publik berbasis digital

   Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan salah satu bentuk pelayanan publik di Kecamatan Pemalang yang mengintegrasikan proses permohonan layanan dalam satu Tempat. Di Kecamatan Pemalangan PATEN sudah dilaksanakan dan sangat membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan administrasi. Dengan perkembangan teknologi saat ini pelayanan publik di Kecamatan Pemalang juga perlu mengikuti perkembangan teknologi berbasis digital.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pelayanan publik berbasis digital adalah transformasi dari pelayanan publik konvensional menjadi system yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Berbasis digital untuk tingkat Kecamatan tidak harus dalam bentuk aplikasi. Kecamatan Pemalang melaksanakan pelayanan publik berbasis teknologi dengan memanfaatkan media sosial untuk memberikan informasi terkait dengan pelayanan publik maupun terkait dengan pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang ada di Kecamatan Pemalang.

2. Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan

   Tugas Kecamatan Pemalang salah satunya adalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan. Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan dari tahun ke tahun penataannya semakin baik hal ini dapat dilihat dari indikator kinerja Kecamatan Pemalang yaitu Persentase desa meningkat. Hal ini Perlu untuk ditingkatkan dengan melaksanakan reformasi tata Kelola pemerintahan desa/kelurahan sehingga tata kelola Pemerintahan Desa / Kelurahan semakin baik dalam segala aspek baik dalam pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kinerja perangkat desa/pegawai kelurahan maupun dalam tertib administrasi pemerintahan.

3. Akuntabilitas Kinerja yang semakin baik

   Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pemalang diukur dari Nilai SAKIP dan penilaian – Penilaian lainnya yang diselenggarakan oleh Kementrian maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk Nilai SAKIP Kecamatan Pemalang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Nilai SAKIP tahun 2025 yang merupakan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2024 mendapatkan Nilai 68,58 dengan kategori BAIK. Akuntabilitas Kinerja yang baik ini perlu ditingkatkan agar semakin baik. Untuk meningkatkan Akuntabilitas Kecamatan Pemalang yang semakin baik diperlukan kesadaran dari seluruh Pegawai Kecamatan Pemalang untuk meningkatkan kinerjanya masing – masing dan adanya koordinasi yang baik dari seluruh Pegawai Kecamatan Pemalang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

4. Pemerataan Pembangunan di Wilayah Kecamatan sebagai akselerasi pengentasan kemiskinan

   Pemerataan pembangunan di Wilayah Kecamatan Pemalang terutama pembangunan infrastruktur di Kelurahan dan Desa mampu menciptakan *multiplier effect*, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi diantaranya dengan menciptakan lapangan kerja dan titik pertumbuhan ekonomi baru, membuka jaringan logistik ke sentra – sentra produksi. Untuk pembangunan infrastruktur di Kelurahan di fokuskan untuk perbaikan jalan dan sarana pendukung jalan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB III
TUJUAN,SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Kecamatan Pemalang dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang pelayanan publik, maka Kecamatan Pemalang harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Kecamatan Pemalang secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat secara umum.

Kecamatan Pemalang dalam menentukan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pemalang harus mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang periode 2025 – 2030. Visi Bupati dan wakil Bupati Pemalang periode RPJMD tahun 2025 – 2029 adalah "**PEMALANG BERCAHAYA -BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA"**. Visi ini memiliki pembentuk kata dengan makna sebagai berikut :

1. **Bersih** dimaknai Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan.
2. **Cakap** dimaknai memiliki sumber daya manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan meman faatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya
3. **Handal** dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang Tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tanggguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislative Bersama unsur masyarakatnya.
4. **Mulya :** Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif, dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

religious. Mulya ini juga menjadi Visi dari RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2045

Misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yaitu **RHAPSODI (Resik, Hijau, Apik, Peduli, Silaturahmi, Organisatoris, Digitalisasi dan Ikhlas),** dengan penjelasan sebagai berikut :

1. **Misi 1 Resik :** menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih. Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik
2. **Misi 2 Hijau :** Meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau berkelanjutan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian yang mendorong kontribusi sektor unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi berdasarkan potensi lokal yaitu peningkatan pengelolaan pertanian yang ramah lingkungan, hilirisasi pertanian, pengembangan industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong proses sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan
3. **Misi 3 Apik :** Meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai Wilayah yang di kelola dengan baik dan ramah. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penataan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai tingkat desa. Membangun Pemalang dari desa sampai kota
4. **Misi 4 Peduli :** Meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat. Misi ini mengandung pengertian Pemerintahan Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik dari pendidikan, Kesehatan dan SDM yang memiliki karakter, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi
5. **Misi 5 Silaturahmi :** Meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong tepa selira dan sejahtera. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, saling menghormati serta kepedulian terhadap sesama.
6. **Misi 6 Organisatoris :**Meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan Good Governance, Clean Governance dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik

https://jdih.pemalangkab.go.id

7. **Misi 7 Digitalisasi :** Memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi pintar. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan reformasi Birokrasi
8. **Misi 8 Ikhlas :** menghadirkan Kembali kehidupan spiritual, kearifan, Bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, mengembangkan kearifan dan budaya lokal.

Kecamatan Pemalang mendukung Misi Bupati dan Wakil Bupati yaitu **Misi 4 Peduli** dan **Misi 6 Organisatoris.**

3.1 Tujuan Strategis Kecamatan Pemalang

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Pemalang selama tahun 2025–2029 adalah "**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan**". Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pemalang sebagai PD yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dengan tujuan **Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan**. Tujuan tersebut diukur dengan indikator Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan.

3.2 Sasaran Strategis Kecamatan Pemalang

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Pemalang dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Pemalang selama tahun 2025-2029, adalah "**Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas perangkat daerah**". Sasaran tersebut diukur dengan indikator :

1. IKM adalah Indeks Survei Kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan Pemalang semester I dan II pada tahun berjalan.Rumus Nilai SKM adalah = Total dari nilai persepsi per unsur x nilai penimbang
2. Nilai SAKIP OPD

https://jdih.pemalangkab.go.id

Adapun teknik merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pemalang dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Teknis Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pemalang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntable, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di Wilayah Kecamatan		Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan	61,54	76,92	100	100	100	100	
		Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah	IKM	86,50	86,65	86,85	87,10	87,40	87,40	
			Nilai SAKIP OPD	65,10	65,20	65,30	65,40	65,50	65,50	

https://jdih.pemalangkab.go.id

3.3 Strategi Kecamatan Pemalang dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2025 – 2029

Strategi yang dilakukan Kecamatan Pemalang untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM Kecamatan Pemalang

   Meningkatkan kualitas SDM Kecamatan Pemalang dengan cara sebagai berikut :

   a. Mengusulkan pegawai Kecamatan Pemalang ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang untuk mengikuti pelatihan, bimbingan teknis maupun sosialisasi yang dapat meningkatkan kompetensi pegawai Kecamatan Pemalang
   b. Mengadakan Pelatihan/Sosialisasi/ Bimbingan Teknis internal di Kecamatan Pemalang kepada Pegawai Kecamatan Pemalang
   c. Mengadakan pelatihan digitalisasi dalam pemberian layanan pemerintahan
2. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas
3. Meningkatnya kualitas pembangunan desa dan kawasan perdesaan
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hidup berdampingan secara harmonis dan kondusif
5. Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntable, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik

3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Pemalang dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2025 - 2029

Penahapan pembangunan Kecamatan Pemalang adalah prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pemalang, Penahapan Renstra Kecamatan Pemalang dapat disajikan pada tabel di bawah ini

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Kecamatan Pemalang

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan infrastruktur di Desa / Kelurahan (peningkatan infrastruktur jalan dan sarana pendukung jalan)	Penguatan Pemberdayaan Masyarakat melalui pelatihan keterampilan untuk mendukung UMKM	Mempercepat pembangunan Kecamatan Pemalang untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat	Mewujudkan daya saing daerah Kecamatan Pemalang	Terwujudnya pondasi transformasi untuk mendukung Pemalang Mulya

https://jdih.pemalangkab.go.id

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategis yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025 – 2030 memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Pemalang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pemalang

NO	OPERASIONALISASI NPSK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN PEMALANG	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembanguan sarana dan prasarana kelurahan	Peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung konektivitas melalui peningkatan kemantapan jalan dan kualitas angkutan yang menghubungkan antar wilayah Peningkatan kualitas digitalisasi pelayanan pemerintahan di fokuskan pada peningkatan tata kelola arsitektur SPBE, mendorong kualitas SMART City dan kualitas layanan aduan Peningkatan kualitas pelayanan publik di fokuskan pada pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan kepuasan pada masyarakat Peningkatan kapasitas pegawai dengan focus Pendidikan dan pelatihan	Meningkatkan infrastruktur di Desa / Kelurahan (peningkatan infrastruktur jalan dan sarana pendukung jalan)	
2	Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan UMKM	Peningkatan kualitas pembangunan Kawasan pedesaan difokuskan pada Indeks Desa, Peningkatan peran BUMdes dalam pembangunan daerah, peningkatan pembinaan dan pengawasan Kecamatan dalam pembangunan desa dan kelurahan serta pengembangankerja sama antar daerah Peningkatan daya saing pariwisata dengan fokus pada peningkatan kunjungan wisatawan dan pemantapan pengelolaan	Penguatan Pemberdayaan Masyarakat melalui pelatihan keterampilan untuk mendukung UMKM	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	OPERASIONALISASI NPSK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN PEMALANG	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		daya Tarik wisata yang ramah lingkungan dan penguatan desa wisata Pengembangan industri kecil menengah dan penguatan sentra /kluster industry, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital Peningkatan pertumbuhan usaha mikro dengan penguatan kelembagaan, akses permodalan melalui peran koperasi Peningkatan pembinaan dan pengawasan Kecamatan dalam pembangunan desa dan kelurahan serta pengembangan Kerjasama antar desa		
3	Mengkoordinasikan upaya untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat	Pengembangan industri kecil menengah dan penguatan sentra /kluster industry, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital Peningkatan investasi dengan mempermudah pelayanan perijinan dan perluasan investasi dengan optimalisasi Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Peningkatan kualitas Laporan Kegiatan Penanaman Modal Peningkatan pertumbuhan usaha mikro dengan penguatan kelembagaan, akses permodalan melalu peran koperasi	Mempercepat pembangunan Kecamatan Pemalang untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat	
4	Mengkoordinasikan Instansi terkait denga Desa/Kelurahan dalam mewujudkan daya saing daerah	Peningkatan daya saing pariwisata dengan fokus pada peningkatan kunjungan wisatawan dan pemantapan pengelolaan daya Tarik wisata yang ramah lingkungan dan penguatan desa wisata Peningkatan kompetensi tenaga kerja yang memilik daya saing sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri	Mewujudkan daya saing daerah Kecamatan Pemalang	
5	Menciptakan pondasi yang kuat	Peningkatan kualitas pembangunan kawasan	Terwujudnya pondasi	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	OPERASIONALISASI NPSK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN PEMALANG	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	mendukung Pemalang Mulya	pedesaan difokuskan pada peningktan indeks desa, peningkatan peran BUMDes dalam pembangunan daerah, peningkatan pembinaan dan pengawasan kecamatan dalam pembangunan desa/kelurahan dan pengembangan kerjasama antar dan pengembangan kerjasama antar desa Peningkatan konektivitas melalui peningkatan kemantapan jalan dan kualitas angkutan yang menghubungkan antar wilayah Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa di fokuskan pada peningkatan kualitas e-procurements, kualitas sarana dan prasarana Peningkatan kualitas perencanaan daerah difokuskan pada transparansi, akuntabilitas perencanaan, dan sinergitas pusat dan provinsi	transformasi untuk mendukung Pemalang Mulya	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pemalang yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 - 2029 :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      h. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah
   2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN
      3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
      b. Sub Kegiatan Penataan Barang Milik Daerah pada SKPD
   4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
      b. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

https://jdih.pemalangkab.go.id

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   h. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
   c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
   d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   f. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

https://jdih.pemalangkab.go.id

g. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
      a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
      a. Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
      b. Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
      c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
   3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
      a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
      b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
      a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
      b. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
      c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
   2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
      a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
      b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
      c. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
      d. Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan
   3. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
      a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

https://jdih.pemalangkab.go.id

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
   b. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
   a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
   a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
   b. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
   c. Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
   d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

F. Program Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintahan Desa
1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
   b. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
   c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
   d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
   e. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
   f. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
   g. Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

https://jdih.pemalangkab.go.id

h. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
i. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
j. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
k. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

4.1. Uraian Program

Progam yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pemalang pada Tahun 2025-2029 sebanyak 6 program yaitu :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator :
   a. Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi (%)
   b. Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%)
2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Persentase pelimpahan kewenangan ke kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)
3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator persentase kelembagaan desa dan kelurahan dengan indikator :
   a. Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)
   b. Persentase sarana dan prasarana kelurahan dengan kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)
4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani (%)
5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)
6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator Jumlah desa yang naik statusnya (desa)

4.2. Uraian Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pemalang pada Tahun 2025 -2029 adalah sebagai berikut :

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai regulasi (Dokumen)

https://jdih.pemalangkab.go.id

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi (%)
3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi (%)
4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi (%)
5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi (%)
6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (%)
7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)
8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (%)
9) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan indikator Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (Laporan / Dokumen)
10) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dengan indikator Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Laporan / Dokumen)
11) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan indikator Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang menunjang pelaksanaan tugas (Kegiatan)
12) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan indikator Jumlah laporan/dokumen koordinasi kegiatan Pemberdayaan desa yang tersusun (Laporan / Dokumen)

https://jdih.pemalangkab.go.id

13) Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan indikator Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan (%)
14) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan indikator Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi (Lembaga Kemasyarakatan)
15) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun (Laporan / Dokumen)
16) Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan indikator Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)
17) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan indikator Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)
18) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun (Laporan / Dokumen)

4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator Target, dan Pagu Indikatif

Sub Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Pemalang Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id

8) Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
9) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
10) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
11) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
12) Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
13) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
14) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
15) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
16) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
17) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
18) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
19) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
20) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
21) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
22) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
23) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
24) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
25) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
26) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
27) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
28) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
29) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
30) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
31) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
32) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

https://jdih.pemalangkab.go.id

33) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
34) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
35) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
36) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
37) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
38) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
39) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
40) Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
41) Sub Kegiatan Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di Wilayah Kecamatan
42) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
43) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
44) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
45) Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
46) Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
47) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
48) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
49) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
50) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
51) Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan
52) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
53) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
54) Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

https://jdih.pemalangkab.go.id

55) Sub Kegiatan Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
56) Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
57) Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional
58) Sub Kegiatan Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
59) Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
60) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
61) Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
62) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
63) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
64) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
65) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
66) Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
67) Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
68) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
69) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
70) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pemalang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanan Kecamatan Pemalang. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Kecamatan Pemalang serta teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pemalang seperti Tabel berikut :

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pemalang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntable, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan				Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan (%)		
		Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah			IKM (Nilai)		
					Nilai SAKIP OPD (Nilai)		
			Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota		Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi (%)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%)		
				Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai regulasi	**Perangkat Daerah yang disusun sesuai regulasi (Dokumen)**		
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi	**Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi (%)**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersusunnya Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai regulasi	**Persentase Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi (%)**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	
				Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	**Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi (%)**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi	**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi (%)**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (%)**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (%)**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipleihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	
				Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sesuai ketentuan	**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	**Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Laporan / Dokumen)**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
					Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)		
				Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai ketentuan	**Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang menunjang pelaksanaan tugas (Kegiatan)**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	
					Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa sesuai ketentuan	**Jumlah laporan/dokumen koordinasi kegiatan Pemberdayaan desa yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	
				Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan sesuai ketentuan	**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan (%)**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	Evaluasi Kelurahan	
				Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi (Lembaga Kemasyarakatan)**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum		**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	
				Terlaksananya koordinasi upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat (Laporan)	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
				Terselenggaranya koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai ketentuan	**Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama		**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	
				Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah sesuai ketentuan	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	
				Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
				Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional	
				Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa		**Jumlah desa yang naik statusnya (Desa)**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	
				Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sesuai ketentuan	**Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
				Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
					dengan Pembangunan Desa (Dokumen)		
				Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan		**Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan (%)**	**46,15**	**76,92**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan														
	Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah		**IKM (Nilai)**	**86,39**	**86,65**		**86,85**		**87,10**		**87,40**		**87,40**		
			Nilai SAKIP OPD (Nilai)	**65,02**	**65,20**		**65,30**		**65,40**		**65,50**		**65,50**		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**18.287.485.000,00**		**18.355.138.498,00**		**18.355.138.498,00**		**18.355.138.498,00**		**18.355.138.498,00**	
7.01	**KECAMATAN**					**18.287.485.000,00**		**18.355.138.498,00**		**18.355.138.498,00**		**18.355.138.498,00**		**18.355.138.498,00**	
	Kecamatan Pemalang					**13.607.653.684,00**		**13.807.058.398,00**		**13.807.058.398,00**		**13.807.058.398,00**		**13.807.058.398,00**	**Kecamatan Pemalang**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota**	**Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi (%)**	**100,00**	**100,00**	**13.135.663.884,00**	**100,00**	**13.288.877.958,00**	**100,00**	**13.288.877.958,00**	**100,00**	**13.288.867.958,00**	**100,00**	**13.288.867.958,00**	**Kecamatan Pemalang**
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%)	**100,00**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**Kecamatan Pemalang**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai regulasi**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai regulasi (Dokumen)**	**14**	**28**	**34.875.500,00**	**29**	**17.748.200,00**	**29**	**17.748.200,00**	**29**	**17.738.200,00**	**30**	**17.738.200,00**	**Kecamatan Pemalang**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	2	2	9.180.000,00	2	2.818.000,00	2	2.818.000,00	2	2.818.000,00	3	2.818.000,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.520.000,00	1	1.369.500,00	1	1.369.500,00	1	1.369.500,00	1	1.369.500,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	4.540.000,00	1	1.679.700,00	1	1.679.700,00	1	1.679.700,00	1	1.679.700,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.520.000,00	1	1.553.700,00	1	1.553.700,00	1	1.553.700,00	1	1.553.700,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	3.790.000,00	1	1.457.700,00	1	1.457.700,00	1	1.457.700,00	1	1.457.700,00	Kecamatan Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	4	18	5.785.000,00	18	2.868.000,00	18	2.868.000,00	18	2.868.000,00	18	2.868.000,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)	4	4	6.540.000,00	4	4.001.600,00	4	4.001.600,00	4	4.001.600,00	4	4.001.600,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0	500,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi**	**Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi (%)**	**100**	**100**	**12.322.117.000,00**	**100**	**12.321.459.400,00**	**100**	**12.321.459.400,00**	**100**	**12.321.459.400,00**	**100**	**12.321.459.400,00**	**Kecamatan Pemalang**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)	86	110	12.320.347.000,00	110	12.320.347.000,00	110	12.320.347.000,00	110	12.320.347.000,00	110	12.320.347.000,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	0	-	4	500.000,00	4	500.000,00	4	500.000,00	4	500.000,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1.770.000,00	1	612.400,00	1	612.400,00	1	612.400,00	1	612.400,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai regulasi**	**Persentase Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi (%)**	**100**	**100**	**1.000,00**	**100**	**1.000.000,00**	**100**	**1.000.000,00**	**100**	**1.000.000,00**	**100**	**1.000.000,00**	**Kecamatan Pemalang**
7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	500,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	500,00	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	Kecamatan Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi**	**Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi (%)**	**100**	**100**	**9.480.000,00**	**100**	**3.628.000,00**	**100**	**3.628.000,00**	**100**	**3.628.000,00**	**100**	**3.628.000,00**	**Kecamatan Pemalang**
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	-	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	32	32	9.480.000,00	32	2.628.000,00	32	2.628.000,00	32	2.628.000,00	32	2.628.000,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi**	**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi (%)**	**100**	**100**	**171.315.444,00**	**100**	**238.421.320,00**	**100**	**238.421.320,00**	**100**	**238.421.320,00**	**100**	**238.421.320,00**	**Kecamatan Pemalang**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	12	12	4.141.000,00	12	4.254.000,00	12	4.254.000,00	12	4.254.000,00	12	4.254.000,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	12	6.050.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	3	12	5.125.000,00	12	9.000.000,00	12	9.000.000,00	12	9.000.000,00	12	9.000.000,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12	12	90.449.444,00	12	98.997.020,00	12	98.997.020,00	12	98.997.020,00	12	98.997.020,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12	12	9.923.500,00	12	7.324.300,00	12	7.324.300,00	12	7.324.300,00	12	7.324.300,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	4.680.000,00	2	4.020.000,00	2	4.020.000,00	2	4.020.000,00	2	4.020.000,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	100	50	50.946.000,00	100	112.826.000,00	100	112.826.000,00	100	112.826.000,00	100	112.826.000,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0	500,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (%)**	**100**	**100**	**108.470.500,00**	**100**	**183.948.098,00**	**100**	**183.948.098,00**	**100**	**183.948.098,00**	**100**	**183.948.098,00**	**Kecamatan Pemalang**

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1	39.514.000,00	1	33.815.000,00	1	33.815.000,00	1	33.815.000,00	1	33.815.000,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	10	6.900.000,00	10	6.500.000,00	10	6.500.000,00	10	6.500.000,00	10	6.500.000,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	4	4	62.056.000,00	9	121.120.000,00	9	121.120.000,00	9	121.120.000,00	9	121.120.000,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	500,00	1	22.513.098,00	1	22.513.098,00	1	22.513.098,00	1	22.513.098,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100**	**100**	**276.484.000,00**	**100**	**294.076.000,00**	**100**	**294.076.000,00**	**100**	**294.076.000,00**	**100**	**294.076.000,00**	**Kecamatan Pemalang**
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	1	1	9.440.000,00	1	2.362.000,00	1	2.362.000,00	1	2.362.000,00	1	2.362.000,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	37.814.000,00	12	37.680.000,00	12	37.680.000,00	12	37.680.000,00	12	37.680.000,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	229.230.000,00	12	254.034.000,00	12	254.034.000,00	12	254.034.000,00	12	254.034.000,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (%)**	**100**	**100**	**212.920.440,00**	**100**	**228.596.940,00**	**100**	**228.596.940,00**	**100**	**228.596.940,00**	**100**	**228.596.940,00**	**Kecamatan Pemalang**
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipleihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0	-	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	Kelurahan Bojongbata
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13	14	30.440.000,00	14	23.237.500,00	15	23.237.500,00	16	23.237.500,00	17	23.237.500,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	15	15	4.500.000,00	15	4.500.000,00	15	4.500.000,00	15	4.500.000,00	15	4.500.000,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	19	19	13.030.000,00	19	13.030.000,00	19	13.030.000,00	19	13.030.000,00	19	13.030.000,00	Kecamatan Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	164.950.440,00	1	132.829.440,00	1	132.829.440,00	1	132.829.440,00	1	132.829.440,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	Kecamatan Pemalang
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**	**62,96**	**73,33**	**22.022.000,00**	**76,67**	**12.255.800,00**	**79,33**	**12.255.800,00**	**82,67**	**12.255.800,00**	**82,67**	**12.255.800,00**	**Kecamatan Pemalang**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sesuai ketentuan**	**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**2**	**4**	**5.925.000,00**	**4**	**2.045.000,00**	**4**	**2.045.000,00**	**4**	**2.045.000,00**	**4**	**2.045.000,00**	**Kecamatan Pemalang**
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	4	5.925.000,00	4	2.045.000,00	4	2.045.000,00	4	2.045.000,00	4	2.045.000,00	Kecamatan Pemalang
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan**	**Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Laporan / Dokumen)**	**2**	**5**	**4.216.000,00**	**5**	**2.170.000,00**	**5**	**2.170.000,00**	**5**	**2.170.000,00**	**5**	**2.170.000,00**	**Kecamatan Pemalang**
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	0	1	500,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	Kecamatan Pemalang
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	4.215.000,00	2	1.170.000,00	2	1.170.000,00	2	1.170.000,00	2	1.170.000,00	Kecamatan Pemalang
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	2	500,00	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	Kecamatan Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai ketentuan**	**Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang menunjang pelaksanaan tugas (Kegiatan)**	**2**	**5**	**11.881.000,00**	**5**	**8.040.800,00**	**5**	**8.040.800,00**	**5**	**8.040.800,00**	**5**	**8.040.800,00**	**Kecamatan Pemalang**
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	2	4	11.880.000,00	4	7.540.800,00	4	7.540.800,00	4	7.540.800,00	4	7.540.800,00	Kecamatan Pemalang
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	0	1	1.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	Kecamatan Pemalang
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**	**100,00**	**100,00**	**274.829.800,00**	**100,00**	**459.471.240,00**	**100,00**	**459.471.240,00**	**100,00**	**459.471.240,00**	**100,00**	**459.471.240,00**	**Kecamatan Pemalang**
			Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)	**60,00**	**65,00**		**67,25**		**70,00**		**72,50**		**72,50**		**Kecamatan Pemalang**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa sesuai ketentuan**	**Jumlah laporan/dokumen koordinasi kegiatan Pemberdayaan desa yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**5**	**7**	**274.828.800,00**	**7**	**458.471.240,00**	**7**	**458.471.240,00**	**7**	**458.471.240,00**	**7**	**458.471.240,00**	**Kecamatan Pemalang**
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	0	1	3.005.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	Kecamatan Pemalang
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	2	4	236.880.000,00	4	432.920.000,00	4	432.920.000,00	4	432.920.000,00	4	432.920.000,00	Kecamatan Pemalang
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3	2	34.943.800,00	2	25.051.240,00	2	25.051.240,00	2	25.051.240,00	2	25.051.240,00	Kecamatan Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan sesuai ketentuan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan (%)**	**0**	**0**	**-**	**100**	**500.000,00**	**100**	**500.000,00**	**100**	**500.000,00**	**100**	**500.000,00**	**Kecamatan Pemalang**
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	0	-	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	Kecamatan Pemalang
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi (Lembaga Kemasyarakatan)**	**0**	**0**	**1.000,00**	**4**	**500.000,00**	**4**	**500.000,00**	**4**	**500.000,00**	**4**	**500.000,00**	**Kecamatan Pemalang**
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	0	1.000,00	4	500.000,00	4	500.000,00	4	500.000,00	4	500.000,00	Kecamatan Pemalang
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)**	**100,00**	**100,00**	**5.890.500,00**	**100,00**	**2.130.000,00**	**100,00**	**2.130.000,00**	**100,00**	**2.130.000,00**	**100,00**	**2.130.000,00**	**Kecamatan Pemalang**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Terlaksananya koordinasi upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum**	**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**3**	**4**	**5.890.000,00**	**5**	**1.880.000,00**	**5**	**1.880.000,00**	**5**	**1.880.000,00**	**5**	**1.880.000,00**	**Kecamatan Pemalang**
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3	4	5.890.000,00	4	1.630.000,00	4	1.630.000,00	4	1.630.000,00	4	1.630.000,00	Kecamatan Pemalang
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat (Laporan)	0	0	-	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	Kecamatan Pemalang
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Terselenggaranya koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai ketentuan**	**Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**0**	**500,00**	**1**	**250.000,00**	**1**	**250.000,00**	**1**	**250.000,00**	**1**	**250.000,00**	**Kecamatan Pemalang**
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakkan	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan	0	0	500,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	Kecamatan Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)												
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama**	**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)**	**100,00**	**100,00**	**33.676.000,00**	**100,00**	**24.418.400,00**	**100,00**	**24.418.400,00**	**100,00**	**24.418.400,00**	**100,00**	**24.418.400,00**	**Kecamatan Pemalang**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah sesuai ketentuan**	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**5**	**11**	**33.676.000,00**	**11**	**24.418.400,00**	**11**	**24.418.400,00**	**11**	**24.418.400,00**	**11**	**24.418.400,00**	**Kecamatan Pemalang**
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	750	500	22.820.000,00	500	16.063.400,00	500	16.063.400,00	500	16.063.400,00	500	16.063.400,00	Kecamatan Pemalang
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	0	30	500,00	30	500.000,00	30	500.000,00	30	500.000,00	30	500.000,00	Kecamatan Pemalang
7.01.05.2.01.0005	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	0	4	500,00	4	500.000,00	4	500.000,00	4	500.000,00	4	500.000,00	Kecamatan Pemalang
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	2	4	10.855.000,00	4	7.355.000,00	4	7.355.000,00	4	7.355.000,00	4	7.355.000,00	Kecamatan Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa**	**Jumlah desa yang naik statusnya (Desa)**	**2,00**	**2,00**	**135.571.500,00**	**3,00**	**19.905.000,00**	**0,00**	**19.905.000,00**	**0,00**	**19.905.000,00**	**0,00**	**19.905.000,00**	**Kecamatan Pemalang**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sesuai ketentuan**	**Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**83**	**87**	**135.571.500,00**	**87**	**19.905.000,00**	**87**	**19.905.000,00**	**87**	**19.905.000,00**	**87**	**19.905.000,00**	**Kecamatan Pemalang**
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	13	39	6.185.000,00	39	3.645.000,00	39	3.645.000,00	39	3.645.000,00	39	3.645.000,00	Kecamatan Pemalang
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	13	13	2.545.000,00	13	1.585.000,00	13	1.585.000,00	13	1.585.000,00	13	1.585.000,00	Kecamatan Pemalang
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	14	39	6.485.000,00	39	3.355.000,00	39	3.355.000,00	39	3.355.000,00	39	3.355.000,00	Kecamatan Pemalang
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	0	2	500,00	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	Kecamatan Pemalang
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	12	103.000.000,00	0	500.000,00	1	500.000,00	0	500.000,00	0	500.000,00	Kecamatan Pemalang
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	0	13	500,00	0	500.000,00	0	500.000,00	0	500.000,00	0	500.000,00	Kecamatan Pemalang
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	1	0	3.475.000,00	5	1.575.000,00	1	1.575.000,00	6	1.575.000,00	7	1.575.000,00	Kecamatan Pemalang
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	20	3	6.700.000,00	3	3.510.000,00	3	3.510.000,00	3	3.510.000,00	3	3.510.000,00	Kecamatan Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	0	0	500,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	Kecamatan Pemalang
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	20	2	2.060.000,00	2	1.435.000,00	2	1.435.000,00	2	1.435.000,00	2	1.435.000,00	Kecamatan Pemalang
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	2	3	5.120.000,00	3	2.800.000,00	3	2.800.000,00	3	2.800.000,00	3	2.800.000,00	Kecamatan Pemalang
	Kelurahan Bojongbata					**640.320.996,00**		**651.529.775,00**		**651.529.775,00**		**651.529.775,00**		**651.529.775,00**	**Kelurahan Bojongbata**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota**	**Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi (%)**	**100,00**	**100,00**	**302.485.233,00**	**100,00**	**363.011.915,00**	**100,00**	**363.011.915,00**	**100,00**	**363.011.915,00**	**100,00**	**363.011.915,00**	**Kelurahan Bojongbata**
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%)	**100,00**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**Kelurahan Bojongbata**
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi**	**Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi (%)**	**0**	**100**	**-**	**100**	**2.500.000,00**	**100**	**2.500.000,00**	**100**	**2.500.000,00**	**100**	**2.500.000,00**	**Kelurahan Bojongbata**
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	Kelurahan Bojongbata
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	-	20	2.000.000,00	20	2.000.000,00	20	2.000.000,00	20	2.000.000,00	Kelurahan Bojongbata
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi**	**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi (%)**	**100**	**100**	**91.930.733,00**	**100**	**101.766.415,00**	**100**	**101.766.415,00**	**100**	**101.766.415,00**	**100**	**101.766.415,00**	**Kelurahan Bojongbata**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	12	12	6.491.000,00	12	4.059.500,00	12	4.059.500,00	12	4.059.500,00	12	4.059.500,00	Kelurahan Bojongbata
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	7.296.200,00	12	7.410.950,00	12	7.410.950,00	12	7.410.950,00	12	7.410.950,00	Kelurahan Bojongbata

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	0	0	-	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	Kelurahan Bojongbata
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12	12	55.730.033,00	12	53.187.165,00	12	53.187.165,00	12	53.187.165,00	12	53.187.165,00	Kelurahan Bojongbata
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12	12	9.513.500,00	12	1.978.800,00	12	1.978.800,00	12	1.978.800,00	12	1.978.800,00	Kelurahan Bojongbata
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	0	-	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	Kelurahan Bojongbata
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	8	8	12.900.000,00	25	34.130.000,00	25	34.130.000,00	25	34.130.000,00	25	34.130.000,00	Kelurahan Bojongbata
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (%)**	**100**	**100**	**14.290.000,00**	**100**	**59.175.000,00**	**100**	**59.175.000,00**	**100**	**59.175.000,00**	**100**	**59.175.000,00**	**Kelurahan Bojongbata**
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	-	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	Kelurahan Bojongbata
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	4	4	14.290.000,00	7	58.675.000,00	7	58.675.000,00	7	58.675.000,00	7	58.675.000,00	Kelurahan Bojongbata
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100**	**100**	**196.264.500,00**	**100**	**147.570.500,00**	**100**	**147.570.500,00**	**100**	**147.570.500,00**	**100**	**147.570.500,00**	**Kelurahan Bojongbata**
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	0	0	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	Kelurahan Bojongbata
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	20.200.500,00	12	18.650.500,00	12	18.650.500,00	12	18.650.500,00	12	18.650.500,00	Kelurahan Bojongbata
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	Kelurahan Bojongbata
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	176.064.000,00	12	127.920.000,00	12	127.920.000,00	12	127.920.000,00	12	127.920.000,00	Kelurahan Bojongbata

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (%)**	**0**	**0**	-	**100**	**52.000.000,00**	**100**	**52.000.000,00**	**100**	**52.000.000,00**	**100**	**52.000.000,00**	**Kelurahan Bojongbata**
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipleihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0	-	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	Kelurahan Bojongbata
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	0	-	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	Kelurahan Bojongbata
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	-	5	250.000,00	5	250.000,00	5	250.000,00	5	250.000,00	Kelurahan Bojongbata
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	-	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	Kelurahan Bojongbata
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	-	1	50.250.000,00	1	50.250.000,00	1	50.250.000,00	1	50.250.000,00	Kelurahan Bojongbata
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	-	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	Kelurahan Bojongbata
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**	**62,96**	**73,33**	-	**76,67**	**500.000,00**	**79,33**	**500.000,00**	**82,67**	**500.000,00**	**82,67**	**500.000,00**	**Kelurahan Bojongbata**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sesuai ketentuan**	**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**0**	-	**2**	**250.000,00**	**2**	**250.000,00**	**2**	**250.000,00**	**2**	**250.000,00**	**Kelurahan Bojongbata**
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	-	-	2	250.000,00	2	250.000,00	2	250.000,00	2	250.000,00	Kelurahan Bojongbata
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit**	**Terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit**	**Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan**	**0**	**0**	-	**2**	**250.000,00**	**2**	**250.000,00**	**2**	**250.000,00**	**2**	**250.000,00**	**Kelurahan Bojongbata**

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan**	**oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Laporan / Dokumen)**												
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	0	-	2	250.000,00	2	250.000,00	2	250.000,00	2	250.000,00	Kelurahan Bojongbata
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**	**100,00**	**100,00**	**327.210.263,00**	**100,00**	**285.066.260,00**	**100,00**	**285.066.260,00**	**100,00**	**285.066.260,00**	**100,00**	**285.066.260,00**	**Kelurahan Bojongbata**
			Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)	**60,00**	**65,00**		**67,25**		**70,00**		**72,50**		**72,50**		**Kelurahan Bojongbata**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan sesuai ketentuan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan (%)**	**100**	**100**	**327.210.263,00**	**100**	**285.066.260,00**	**100**	**285.066.260,00**	**100**	**285.066.260,00**	**100**	**285.066.260,00**	**Kelurahan Bojongbata**
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	5	5	12.450.000,00	5	10.350.000,00	5	10.350.000,00	5	10.350.000,00	5	10.350.000,00	Kelurahan Bojongbata
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2	2	160.178.263,00	2	128.800.000,00	2	128.800.000,00	2	128.800.000,00	2	128.800.000,00	Kelurahan Bojongbata
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5	5	154.582.000,00	5	145.916.260,00	5	145.916.260,00	5	145.916.260,00	5	145.916.260,00	Kelurahan Bojongbata
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)**	**100,00**	**100,00**	**500,00**	**100,00**	**500.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**Kelurahan Bojongbata**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Terlaksananya koordinasi upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum**	**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**0**	**500,00**	**2**	**500.000,00**	**2**	**500.000,00**	**2**	**500.000,00**	**2**	**500.000,00**	**Kelurahan Bojongbata**

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	0	500,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	Kelurahan Bojongbata
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat (Laporan)	0	0	-	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	Kelurahan Bojongbata
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama**	**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)**	**100,00**	**100,00**	**10.625.000,00**	**100,00**	**2.451.600,00**	**100,00**	**2.451.600,00**	**100,00**	**2.451.600,00**	**100,00**	**2.451.600,00**	**Kelurahan Bojongbata**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah sesuai ketentuan**	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**4**	**2**	**10.625.000,00**	**4**	**2.451.600,00**	**4**	**2.451.600,00**	**4**	**2.451.600,00**	**4**	**2.451.600,00**	**Kelurahan Bojongbata**
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	560	91	10.625.000,00	91	1.951.600,00	91	1.951.600,00	91	1.951.600,00	91	1.951.600,00	Kelurahan Bojongbata
7.01.05.2.01.0005	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	0	0	-	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	Kelurahan Bojongbata
	Kelurahan Kebondalem					**623.630.142,00**		**654.131.625,00**		**654.131.625,00**		**654.131.625,00**		**654.131.625,00**	**Kelurahan Kebondalem**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota**	**Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi (%)**	**100,00**	**100,00**	**322.731.142,00**	**100,00**	**377.999.350,00**	**100,00**	**377.999.350,00**	**100,00**	**377.999.350,00**	**100,00**	**377.999.350,00**	**Kelurahan Kebondalem**

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%)	**100,00**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**Kelurahan Kebondalem**
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi**	**Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi (%)**	**0**	**100**	**-**	**100**	**2.500.000,00**	**100**	**2.500.000,00**	**100**	**2.500.000,00**	**100**	**2.500.000,00**	**Kelurahan Kebondalem**
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	Kelurahan Kebondalem
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	-	20	2.000.000,00	20	2.000.000,00	20	2.000.000,00	20	2.000.000,00	Kelurahan Kebondalem
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi**	**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi (%)**	**100**	**100**	**38.015.142,00**	**100**	**86.426.100,00**	**100**	**86.426.100,00**	**100**	**86.426.100,00**	**100**	**86.426.100,00**	**Kelurahan Kebondalem**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	12	12	4.726.000,00	12	4.228.500,00	12	4.228.500,00	12	4.228.500,00	12	4.228.500,00	Kelurahan Kebondalem
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	-	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	Kelurahan Kebondalem
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	1	1	3.400.000,00	12	3.300.000,00	12	3.300.000,00	12	3.300.000,00	12	3.300.000,00	Kelurahan Kebondalem
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12	12	21.202.500,00	12	46.555.600,00	12	46.555.600,00	12	46.555.600,00	12	46.555.600,00	Kelurahan Kebondalem
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12	12	6.190.642,00	12	3.842.000,00	12	3.842.000,00	12	3.842.000,00	12	3.842.000,00	Kelurahan Kebondalem
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	2.496.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	Kelurahan Kebondalem
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	0	0	-	25	25.500.000,00	25	25.500.000,00	25	25.500.000,00	25	25.500.000,00	Kelurahan Kebondalem
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (%)**	**100**	**100**	**77.182.600,00**	**100**	**59.530.000,00**	**100**	**59.530.000,00**	**100**	**59.530.000,00**	**100**	**59.530.000,00**	**Kelurahan Kebondalem**

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1	15.500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	Kelurahan Kebondalem
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	2	2	61.682.600,00	5	59.030.000,00	5	59.030.000,00	5	59.030.000,00	5	59.030.000,00	Kelurahan Kebondalem
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100**	**100**	**157.814.400,00**	**100**	**147.055.500,00**	**100**	**147.055.500,00**	**100**	**147.055.500,00**	**100**	**147.055.500,00**	**Kelurahan Kebondalem**
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	0	0	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	Kelurahan Kebondalem
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	39.794.400,00	12	25.635.500,00	12	25.635.500,00	12	25.635.500,00	12	25.635.500,00	Kelurahan Kebondalem
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	Kelurahan Kebondalem
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	118.020.000,00	12	120.420.000,00	12	120.420.000,00	12	120.420.000,00	12	120.420.000,00	Kelurahan Kebondalem
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (%)**	**100**	**100**	**49.719.000,00**	**100**	**82.487.750,00**	**100**	**82.487.750,00**	**100**	**82.487.750,00**	**100**	**82.487.750,00**	**Kelurahan Kebondalem**
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipleihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	Kelurahan Kebondalem
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7	7	8.540.000,00	7	6.766.750,00	7	6.766.750,00	7	6.766.750,00	7	6.766.750,00	Kelurahan Kebondalem
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	Kelurahan Kebondalem
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10	10.430.000,00	10	8.910.000,00	10	8.910.000,00	10	8.910.000,00	10	8.910.000,00	Kelurahan Kebondalem

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	30.749.000,00	1	65.311.000,00	1	65.311.000,00	1	65.311.000,00	1	65.311.000,00	Kelurahan Kebondalem
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	Kelurahan Kebondalem
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**	**62,96**	**73,33**	**5.000.000,00**	**76,67**	**3.500.000,00**	**79,33**	**3.500.000,00**	**82,67**	**3.500.000,00**	**82,67**	**3.500.000,00**	**Kelurahan Kebondalem**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sesuai ketentuan**	**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**0**	-	**2**	**250.000,00**	**2**	**250.000,00**	**2**	**250.000,00**	**2**	**250.000,00**	**Kelurahan Kebondalem**
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	-	-	2	250.000,00	2	250.000,00	2	250.000,00	2	250.000,00	Kelurahan Kebondalem
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan**	**Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Laporan / Dokumen)**	**32**	**32**	**5.000.000,00**	**2**	**3.250.000,00**	**2**	**3.250.000,00**	**2**	**3.250.000,00**	**2**	**3.250.000,00**	**Kelurahan Kebondalem**
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	32	24	5.000.000,00	2	3.250.000,00	2	3.250.000,00	2	3.250.000,00	2	3.250.000,00	Kelurahan Kebondalem
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**	**100,00**	**100,00**	**284.369.000,00**	**100,00**	**263.950.000,00**	**100,00**	**263.950.000,00**	**100,00**	**263.950.000,00**	**100,00**	**263.950.000,00**	**Kelurahan Kebondalem**
			Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)	**60,00**	**65,00**		**67,25**		**70,00**		**72,50**		**72,50**		**Kelurahan Kebondalem**

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan sesuai ketentuan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan (%)**	**100**	**100**	**284.369.000,00**	**100**	**263.950.000,00**	**100**	**263.950.000,00**	**100**	**263.950.000,00**	**100**	**263.950.000,00**	**Kelurahan Kebondalem**
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	5	5	12.050.000,00	5	10.550.000,00	5	10.550.000,00	5	10.550.000,00	5	10.550.000,00	Kelurahan Kebondalem
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2	2	100.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	Kelurahan Kebondalem
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3	3	172.319.000,00	3	173.400.000,00	3	173.400.000,00	3	173.400.000,00	3	173.400.000,00	Kelurahan Kebondalem
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)**	**100,00**	**100,00**	**4.850.000,00**	**100,00**	**3.092.275,00**	**100,00**	**3.092.275,00**	**100,00**	**3.092.275,00**	**100,00**	**3.092.275,00**	**Kelurahan Kebondalem**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Terlaksananya koordinasi upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum**	**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**2**	**4.850.000,00**	**2**	**3.092.275,00**	**2**	**3.092.275,00**	**2**	**3.092.275,00**	**2**	**3.092.275,00**	**Kelurahan Kebondalem**
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	1	4.850.000,00	1	2.592.275,00	1	2.592.275,00	1	2.592.275,00	1	2.592.275,00	Kelurahan Kebondalem
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat (Laporan)	0	0	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	Kelurahan Kebondalem
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama**	**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)**	**100,00**	**100,00**	**6.680.000,00**	**100,00**	**5.590.000,00**	**100,00**	**5.590.000,00**	**100,00**	**5.590.000,00**	**100,00**	**5.590.000,00**	**Kelurahan Kebondalem**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Terselenggaranya urusan pemerintahan umum**	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**4**	**2**	**6.680.000,00**	**4**	**5.590.000,00**	**4**	**5.590.000,00**	**4**	**5.590.000,00**	**4**	**5.590.000,00**	**Kelurahan Kebondalem**

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**sesuai penugasan kepala daerah sesuai ketentuan**	**sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)**												
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	500	67	6.680.000,00	67	5.090.000,00	67	5.090.000,00	67	5.090.000,00	67	5.090.000,00	Kelurahan Kebondalem
7.01.05.2.01.0005	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	0	0	-	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	Kelurahan Kebondalem
	Kelurahan Mulyoharjo					**892.088.124,00**		**767.217.350,00**		**767.217.350,00**		**767.217.350,00**		**767.217.350,00**	**Kelurahan Mulyoharjo**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota**	**Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi (%)**	**100,00**	**100,00**	**371.864.124,00**	**100,00**	**402.172.550,00**	**100,00**	**402.172.550,00**	**100,00**	**402.172.550,00**	**100,00**	**402.172.550,00**	**Kelurahan Mulyoharjo**
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%)	**100,00**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**Kelurahan Mulyoharjo**
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi**	**Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi (%)**	**0**	**100**	**500,00**	**100**	**2.500.000,00**	**100**	**2.500.000,00**	**100**	**2.500.000,00**	**100**	**2.500.000,00**	**Kelurahan Mulyoharjo**
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	500,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	Kelurahan Mulyoharjo
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	-	20	2.000.000,00	20	2.000.000,00	20	2.000.000,00	20	2.000.000,00	Kelurahan Mulyoharjo
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi**	**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi (%)**	**100**	**100**	**121.081.000,00**	**100**	**112.796.450,00**	**100**	**112.796.450,00**	**100**	**112.796.450,00**	**100**	**112.796.450,00**	**Kelurahan Mulyoharjo**

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	4	4	2.565.000,00	4	952.500,00	4	952.500,00	4	952.500,00	4	952.500,00	Kelurahan Mulyoharjo
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	500,00	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	Kelurahan Mulyoharjo
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	0	0	500,00	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	Kelurahan Mulyoharjo
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12	12	99.814.500,00	12	78.093.150,00	12	78.093.150,00	12	78.093.150,00	12	78.093.150,00	Kelurahan Mulyoharjo
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	0	12	3.500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	Kelurahan Mulyoharjo
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	0	500,00	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	Kelurahan Mulyoharjo
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	15.200.000,00	25	31.750.800,00	25	31.750.800,00	25	31.750.800,00	25	31.750.800,00	Kelurahan Mulyoharjo
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (%)**	**100**	**100**	**22.390.500,00**	**100**	**51.000.000,00**	**100**	**51.000.000,00**	**100**	**51.000.000,00**	**100**	**51.000.000,00**	**Kelurahan Mulyoharjo**
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	500,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	Kelurahan Mulyoharjo
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	0	1	22.390.000,00	4	50.500.000,00	4	50.500.000,00	4	50.500.000,00	4	50.500.000,00	Kelurahan Mulyoharjo
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100**	**100**	**217.316.000,00**	**100**	**185.016.000,00**	**100**	**185.016.000,00**	**100**	**185.016.000,00**	**100**	**185.016.000,00**	**Kelurahan Mulyoharjo**
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	0	1	840.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	Kelurahan Mulyoharjo
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	35.214.000,00	12	33.714.000,00	12	33.714.000,00	12	33.714.000,00	12	33.714.000,00	Kelurahan Mulyoharjo
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	1	1	9.380.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	Kelurahan Mulyoharjo

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)												
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	171.882.000,00	12	148.302.000,00	12	148.302.000,00	12	148.302.000,00	12	148.302.000,00	Kelurahan Mulyoharjo
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (%)**	**100**	**100**	**11.076.124,00**	**100**	**50.860.100,00**	**100**	**50.860.100,00**	**100**	**50.860.100,00**	**100**	**50.860.100,00**	**Kelurahan Mulyoharjo**
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipleihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0	500,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	Kelurahan Mulyoharjo
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	5	1.074.124,00	5	360.100,00	5	360.100,00	5	360.100,00	5	360.100,00	Kelurahan Mulyoharjo
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	500,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	Kelurahan Mulyoharjo
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	500,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	Kelurahan Mulyoharjo
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	10.000.000,00	1	50.100.000,00	1	50.100.000,00	1	50.100.000,00	1	50.100.000,00	Kelurahan Mulyoharjo
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	500,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	Kelurahan Mulyoharjo
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**	**62,96**	**73,33**	**500,00**	**76,67**	**500.000,00**	**79,33**	**500.000,00**	**82,67**	**500.000,00**	**82,67**	**500.000,00**	**Kelurahan Mulyoharjo**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sesuai ketentuan**	**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**0**	**-**	**2**	**250.000,00**	**2**	**250.000,00**	**2**	**250.000,00**	**2**	**250.000,00**	**Kelurahan Mulyoharjo**

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	-	-	2	250.000,00	2	250.000,00	2	250.000,00	2	250.000,00	Kelurahan Mulyoharjo
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan**	**Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Laporan / Dokumen)**	**0**	**0**	**500,00**	**2**	**250.000,00**	**2**	**250.000,00**	**2**	**250.000,00**	**2**	**250.000,00**	**Kelurahan Mulyoharjo**
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	0	500,00	2	250.000,00	2	250.000,00	2	250.000,00	2	250.000,00	Kelurahan Mulyoharjo
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**	**100,00**	**100,00**	**513.123.000,00**	**100,00**	**361.684.800,00**	**100,00**	**361.684.800,00**	**100,00**	**361.684.800,00**	**100,00**	**361.684.800,00**	**Kelurahan Mulyoharjo**
			Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)	**60,00**	**65,00**		**67,25**		**70,00**		**72,50**		**72,50**		**Kelurahan Mulyoharjo**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan sesuai ketentuan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan (%)**	**100**	**100**	**513.123.000,00**	**100**	**361.684.800,00**	**100**	**361.684.800,00**	**100**	**361.684.800,00**	**100**	**361.684.800,00**	**Kelurahan Mulyoharjo**
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	5	5	10.175.000,00	5	8.630.400,00	5	8.630.400,00	5	8.630.400,00	5	8.630.400,00	Kelurahan Mulyoharjo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2	2	265.000.000,00	2	115.000.000,00	2	115.000.000,00	2	115.000.000,00	2	115.000.000,00	Kelurahan Mulyoharjo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5	5	237.948.000,00	5	238.054.400,00	5	238.054.400,00	5	238.054.400,00	5	238.054.400,00	Kelurahan Mulyoharjo
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)**	**100,00**	**100,00**	**900.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**Kelurahan Mulyoharjo**

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Terlaksananya koordinasi upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum**	**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**2**	**900.000,00**	**2**	**500.000,00**	**2**	**500.000,00**	**2**	**500.000,00**	**2**	**500.000,00**	**Kelurahan Mulyoharjo**
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	1	450.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	Kelurahan Mulyoharjo
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat (Laporan)	0	1	450.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	Kelurahan Mulyoharjo
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama**	**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)**	**100,00**	**100,00**	**6.200.500,00**	**100,00**	**2.360.000,00**	**100,00**	**2.360.000,00**	**100,00**	**2.360.000,00**	**100,00**	**2.360.000,00**	**Kelurahan Mulyoharjo**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah sesuai ketentuan**	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**4**	**2**	**6.200.500,00**	**4**	**2.360.000,00**	**4**	**2.360.000,00**	**4**	**2.360.000,00**	**4**	**2.360.000,00**	**Kelurahan Mulyoharjo**
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	575	74	6.200.000,00	74	1.860.000,00	74	1.860.000,00	74	1.860.000,00	74	1.860.000,00	Kelurahan Mulyoharjo
7.01.05.2.01.0005	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	0	0	500,00	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	Kelurahan Mulyoharjo

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Kelurahan Paduraksa					**566.922.504,00**		**572.407.275,00**		**572.407.275,00**		**572.407.275,00**		**572.407.275,00**	**Kelurahan Paduraksa**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota**	**Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi (%)**	**100,00**	**100,00**	**256.794.004,00**	**100,00**	**308.358.875,00**	**100,00**	**308.358.875,00**	**100,00**	**308.358.875,00**	**100,00**	**308.358.875,00**	**Kelurahan Paduraksa**
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%)	**100,00**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**Kelurahan Paduraksa**
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi**	**Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi (%)**	**0**	**100**	**500,00**	**100**	**3.000.000,00**	**100**	**3.000.000,00**	**100**	**3.000.000,00**	**100**	**3.000.000,00**	**Kelurahan Paduraksa**
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	500,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	Kelurahan Paduraksa
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	-	20	2.000.000,00	20	2.000.000,00	20	2.000.000,00	20	2.000.000,00	Kelurahan Paduraksa
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi**	**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi (%)**	**100**	**100**	**76.239.844,00**	**100**	**83.458.875,00**	**100**	**83.458.875,00**	**100**	**83.458.875,00**	**100**	**83.458.875,00**	**Kelurahan Paduraksa**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	8	2	943.530,00	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	Kelurahan Paduraksa
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	10.490.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	Kelurahan Paduraksa
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	0	1	1.344.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	Kelurahan Paduraksa
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12	12	43.948.314,00	12	52.458.875,00	12	52.458.875,00	12	52.458.875,00	12	52.458.875,00	Kelurahan Paduraksa
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12	12	4.513.500,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	Kelurahan Paduraksa
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	0	500,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	Kelurahan Paduraksa

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	0	5	15.000.000,00	25	26.000.000,00	25	26.000.000,00	25	26.000.000,00	25	26.000.000,00	Kelurahan Paduraksa
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (%)**	**100**	**100**	**33.501.160,00**	**100**	**54.000.000,00**	**100**	**54.000.000,00**	**100**	**54.000.000,00**	**100**	**54.000.000,00**	**Kelurahan Paduraksa**
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	10	7.220.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	Kelurahan Paduraksa
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	0	2	26.281.160,00	5	53.000.000,00	5	53.000.000,00	5	53.000.000,00	5	53.000.000,00	Kelurahan Paduraksa
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100**	**100**	**134.347.000,00**	**100**	**95.950.000,00**	**100**	**95.950.000,00**	**100**	**95.950.000,00**	**100**	**95.950.000,00**	**Kelurahan Paduraksa**
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	0	0	500,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	Kelurahan Paduraksa
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	17.850.000,00	12	18.774.000,00	12	18.774.000,00	12	18.774.000,00	12	18.774.000,00	Kelurahan Paduraksa
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	500,00	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	Kelurahan Paduraksa
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	116.496.000,00	12	76.176.000,00	12	76.176.000,00	12	76.176.000,00	12	76.176.000,00	Kelurahan Paduraksa
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (%)**	**100**	**100**	**12.705.500,00**	**100**	**71.950.000,00**	**100**	**71.950.000,00**	**100**	**71.950.000,00**	**100**	**71.950.000,00**	**Kelurahan Paduraksa**
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipleihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	Kelurahan Paduraksa
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	3	3.235.000,00	3	450.000,00	3	450.000,00	3	450.000,00	3	450.000,00	Kelurahan Paduraksa

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	5	520.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	Kelurahan Paduraksa
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	3	3.450.000,00	3	1.500.000,00	3	1.500.000,00	3	1.500.000,00	3	1.500.000,00	Kelurahan Paduraksa
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	5.500.000,00	1	64.500.000,00	1	64.500.000,00	1	64.500.000,00	1	64.500.000,00	Kelurahan Paduraksa
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	500,00	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	Kelurahan Paduraksa
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**	**62,96**	**73,33**	**42.000.000,00**	**76,67**	**27.368.400,00**	**79,33**	**27.368.400,00**	**82,67**	**27.368.400,00**	**82,67**	**27.368.400,00**	**Kelurahan Paduraksa**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sesuai ketentuan**	**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**0**	**-**	**2**	**250.000,00**	**2**	**250.000,00**	**2**	**250.000,00**	**2**	**250.000,00**	**Kelurahan Paduraksa**
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	-	-	2	250.000,00	2	250.000,00	2	250.000,00	2	250.000,00	Kelurahan Paduraksa
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan**	**Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Laporan / Dokumen)**	**6**	**4**	**42.000.000,00**	**2**	**27.118.400,00**	**2**	**27.118.400,00**	**2**	**27.118.400,00**	**2**	**27.118.400,00**	**Kelurahan Paduraksa**
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	6	3	42.000.000,00	2	27.118.400,00	2	27.118.400,00	2	27.118.400,00	2	27.118.400,00	Kelurahan Paduraksa
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**	**100**	**100,00**	**251.000.000,00**	**100,00**	**228.730.000,00**	**100,00**	**228.730.000,00**	**100,00**	**228.730.000,00**	**100,00**	**228.730.000,00**	**Kelurahan Paduraksa**
			Persentase sarana prasarana kelurahan	**60,00**	**65,00**		**67,25**		**70,00**		**72,50**		**72,50**		**Kelurahan Paduraksa**

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)												
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan sesuai ketentuan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan (%)**	**100**	**100**	**251.000.000,00**	**100**	**228.730.000,00**	**100**	**228.730.000,00**	**100**	**228.730.000,00**	**100**	**228.730.000,00**	**Kelurahan Paduraksa**
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	5	5	6.000.000,00	5	4.730.000,00	5	4.730.000,00	5	4.730.000,00	5	4.730.000,00	Kelurahan Paduraksa
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1	1	88.500.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	Kelurahan Paduraksa
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7	7	156.500.000,00	7	144.000.000,00	7	144.000.000,00	7	144.000.000,00	7	144.000.000,00	Kelurahan Paduraksa
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)**	**100,00**	**100,00**	**13.928.000,00**	**100,00**	**7.260.000,00**	**100,00**	**7.260.000,00**	**100,00**	**7.260.000,00**	**100,00**	**7.260.000,00**	**Kelurahan Paduraksa**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Terlaksananya koordinasi upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum**	**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**1**	**12**	**13.928.000,00**	**13**	**7.260.000,00**	**13**	**7.260.000,00**	**13**	**7.260.000,00**	**13**	**7.260.000,00**	**Kelurahan Paduraksa**
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	12	13.927.500,00	12	6.260.000,00	12	6.260.000,00	12	6.260.000,00	12	6.260.000,00	Kelurahan Paduraksa
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat (Laporan)	0	0	500,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	Kelurahan Paduraksa
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama**	**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)**	**100,00**	**100,00**	**3.200.500,00**	**100,00**	**690.000,00**	**100,00**	**690.000,00**	**100,00**	**690.000,00**	**100,00**	**690.000,00**	**Kelurahan Paduraksa**

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah sesuai ketentuan**	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**4**	**2**	**3.200.500,00**	**4**	**690.000,00**	**4**	**690.000,00**	**4**	**690.000,00**	**4**	**690.000,00**	**Kelurahan Paduraksa**
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	400	100	3.200.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	Kelurahan Paduraksa
7.01.05.2.01.0005	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	0	0	500,00	2	190.000,00	2	190.000,00	2	190.000,00	2	190.000,00	Kelurahan Paduraksa
	Kelurahan Pelutan					**743.916.096,00**		**692.359.300,00**		**692.359.300,00**		**692.359.300,00**		**692.359.300,00**	**Kelurahan Pelutan**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota**	**Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi (%)**	**100,00**	**100,00**	**422.399.000,00**	**100,00**	**418.588.300,00**	**100,00**	**418.588.300,00**	**100,00**	**418.588.300,00**	**100,00**	**418.588.300,00**	**Kelurahan Pelutan**
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%)	**100,00**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**Kelurahan Pelutan**
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi**	**Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi (%)**	**0**	**0**	**-**	**100**	**2.500.000,00**	**100**	**2.500.000,00**	**100**	**2.500.000,00**	**100**	**2.500.000,00**	**Kelurahan Pelutan**
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	Kelurahan Pelutan
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	-	20	2.000.000,00	20	2.000.000,00	20	2.000.000,00	20	2.000.000,00	Kelurahan Pelutan
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Fasilitasi Administratif Perangkat**	**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang**	**100**	**100**	**86.514.000,00**	**100**	**136.769.300,00**	**100**	**136.769.300,00**	**100**	**136.769.300,00**	**100**	**136.769.300,00**	**Kelurahan Pelutan**

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi	**Dilaksanakan sesuai regulasi (%)**												
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	12	12	1.785.000,00	12	2.192.000,00	12	2.192.000,00	12	2.192.000,00	12	2.192.000,00	Kelurahan Pelutan
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	8.400.000,00	12	200.000,00	12	200.000,00	12	200.000,00	12	200.000,00	Kelurahan Pelutan
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	0	0	-	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	Kelurahan Pelutan
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12	12	12.495.000,00	12	76.915.100,00	12	76.915.100,00	12	76.915.100,00	12	76.915.100,00	Kelurahan Pelutan
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12	12	8.034.000,00	12	3.362.200,00	12	3.362.200,00	12	3.362.200,00	12	3.362.200,00	Kelurahan Pelutan
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	3.000.000,00	2	3.600.000,00	2	3.600.000,00	2	3.600.000,00	2	3.600.000,00	Kelurahan Pelutan
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	52.800.000,00	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00	Kelurahan Pelutan
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (%)**	**100**	**100**	**77.280.500,00**	**100**	**71.000.000,00**	**100**	**71.000.000,00**	**100**	**71.000.000,00**	**100**	**71.000.000,00**	**Kelurahan Pelutan**
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	500,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	Kelurahan Pelutan
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	1	1	77.280.000,00	4	70.500.000,00	4	70.500.000,00	4	70.500.000,00	4	70.500.000,00	Kelurahan Pelutan
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100**	**100**	**109.338.000,00**	**100**	**119.261.500,00**	**100**	**119.261.500,00**	**100**	**119.261.500,00**	**100**	**119.261.500,00**	**Kelurahan Pelutan**
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	1	1	1.500.000,00	1	767.500,00	1	767.500,00	1	767.500,00	1	767.500,00	Kelurahan Pelutan
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	21.180.000,00	12	12.790.000,00	12	12.790.000,00	12	12.790.000,00	12	12.790.000,00	Kelurahan Pelutan

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	Kelurahan Pelutan
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	86.658.000,00	12	105.204.000,00	12	105.204.000,00	12	105.204.000,00	12	105.204.000,00	Kelurahan Pelutan
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (%)**	**100**	**100**	**149.266.500,00**	**100**	**89.057.500,00**	**100**	**89.057.500,00**	**100**	**89.057.500,00**	**100**	**89.057.500,00**	**Kelurahan Pelutan**
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipleihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	Kelurahan Pelutan
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	3	21.080.000,00	3	4.660.500,00	3	4.660.500,00	3	4.660.500,00	3	4.660.500,00	Kelurahan Pelutan
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	12	12	3.250.000,00	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00	Kelurahan Pelutan
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	17	0	500,00	17	5.080.000,00	17	5.080.000,00	17	5.080.000,00	17	5.080.000,00	Kelurahan Pelutan
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	1	124.936.000,00	1	74.317.000,00	1	74.317.000,00	1	74.317.000,00	1	74.317.000,00	Kelurahan Pelutan
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	Kelurahan Pelutan
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**	**62,96**	**73,33**	**22.500.000,00**	**76,67**	**4.561.000,00**	**79,33**	**4.561.000,00**	**82,67**	**4.561.000,00**	**82,67**	**4.561.000,00**	**Kelurahan Pelutan**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat**	**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan**	**0**	**0**	**-**	**2**	**250.000,00**	**2**	**250.000,00**	**2**	**250.000,00**	**2**	**250.000,00**	**Kelurahan Pelutan**

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		kecamatan sesuai ketentuan	**di tingkat kecamatan yang tersusun (Laporan / Dokumen)**												
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	-	-	2	250.000,00	2	250.000,00	2	250.000,00	2	250.000,00	Kelurahan Pelutan
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan**	**Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Laporan / Dokumen)**	**24**	**24**	**22.500.000,00**	**2**	**4.311.000,00**	**2**	**4.311.000,00**	**2**	**4.311.000,00**	**2**	**4.311.000,00**	**Kelurahan Pelutan**
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	24	24	22.500.000,00	2	4.311.000,00	2	4.311.000,00	2	4.311.000,00	2	4.311.000,00	Kelurahan Pelutan
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**	**100**	**100,00**	**279.516.096,00**	**100,00**	**257.660.000,00**	**100,00**	**257.660.000,00**	**100,00**	**257.660.000,00**	**100,00**	**257.660.000,00**	**Kelurahan Pelutan**
			Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)	**60,00**	**65,00**		**67,25**		**70,00**		**72,50**		**72,50**		**Kelurahan Pelutan**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan sesuai ketentuan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan (%)**	**100**	**100**	**279.516.096,00**	**100**	**257.660.000,00**	**100**	**257.660.000,00**	**100**	**257.660.000,00**	**100**	**257.660.000,00**	**Kelurahan Pelutan**
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	3	3	13.200.000,00	3	6.660.000,00	3	6.660.000,00	3	6.660.000,00	3	6.660.000,00	Kelurahan Pelutan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2	2	95.850.096,00	2	72.700.000,00	2	72.700.000,00	2	72.700.000,00	2	72.700.000,00	Kelurahan Pelutan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5	5	170.466.000,00	5	178.300.000,00	5	178.300.000,00	5	178.300.000,00	5	178.300.000,00	Kelurahan Pelutan

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)**	**100,00**	**100,00**	**6.000.500,00**	**100,00**	**3.600.000,00**	**100,00**	**3.600.000,00**	**100,00**	**3.600.000,00**	**100,00**	**3.600.000,00**	**Kelurahan Pelutan**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Terlaksananya koordinasi upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum**	**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**5**	**5**	**6.000.500,00**	**6**	**3.600.000,00**	**6**	**3.600.000,00**	**6**	**3.600.000,00**	**6**	**3.600.000,00**	**Kelurahan Pelutan**
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5	5	6.000.000,00	5	3.100.000,00	5	3.100.000,00	5	3.100.000,00	5	3.100.000,00	Kelurahan Pelutan
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat (Laporan)	0	0	500,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	Kelurahan Pelutan
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama**	**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)**	**100,00**	**100,00**	**13.500.500,00**	**100,00**	**7.950.000,00**	**100,00**	**7.950.000,00**	**100,00**	**7.950.000,00**	**100,00**	**7.950.000,00**	**Kelurahan Pelutan**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah sesuai ketentuan**	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**4**	**2**	**13.500.500,00**	**4**	**7.950.000,00**	**4**	**7.950.000,00**	**4**	**7.950.000,00**	**4**	**7.950.000,00**	**Kelurahan Pelutan**
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	690	150	13.500.000,00	150	7.450.000,00	150	7.450.000,00	150	7.450.000,00	150	7.450.000,00	Kelurahan Pelutan

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.05.2.01.0005	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	0	0	500,00	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	Kelurahan Pelutan
	Kelurahan Sugihwaras					**617.481.276,00**		**635.187.575,00**		**635.187.575,00**		**635.187.575,00**		**635.187.575,00**	**Kelurahan Sugihwaras**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota**	**Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi (%)**	**100,00**	**100,00**	**279.796.776,00**	**100,00**	**352.932.099,00**	**100,00**	**352.932.099,00**	**100,00**	**352.932.099,00**	**100,00**	**352.932.099,00**	**Kelurahan Sugihwaras**
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%)	**100,00**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**Kelurahan Sugihwaras**
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi**	**Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi (%)**	**0**	**100**	**500,00**	**100**	**2.000.000,00**	**100**	**2.000.000,00**	**100**	**2.000.000,00**	**100**	**2.000.000,00**	**Kelurahan Sugihwaras**
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	500,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	Kelurahan Sugihwaras
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	-	20	1.500.000,00	20	1.500.000,00	20	1.500.000,00	20	1.500.000,00	Kelurahan Sugihwaras
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi**	**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi (%)**	**100**	**100**	**38.957.276,00**	**100**	**83.477.600,00**	**100**	**83.477.600,00**	**100**	**83.477.600,00**	**100**	**83.477.600,00**	**Kelurahan Sugihwaras**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	6	6	1.501.500,00	6	1.500.000,00	6	1.500.000,00	6	1.500.000,00	6	1.500.000,00	Kelurahan Sugihwaras
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	5	2.221.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	Kelurahan Sugihwaras
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	0	5	3.500.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	Kelurahan Sugihwaras
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12	12	20.920.050,00	12	42.500.000,00	12	42.500.000,00	12	42.500.000,00	12	42.500.000,00	Kelurahan Sugihwaras
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12	12	3.814.726,00	12	1.797.600,00	12	1.797.600,00	12	1.797.600,00	12	1.797.600,00	Kelurahan Sugihwaras

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	3.000.000,00	2	2.680.000,00	2	2.680.000,00	2	2.680.000,00	2	2.680.000,00	Kelurahan Sugihwaras
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	0	12	4.000.000,00	25	30.000.000,00	25	30.000.000,00	25	30.000.000,00	25	30.000.000,00	Kelurahan Sugihwaras
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (%)**	**100**	**100**	**48.630.000,00**	**100**	**52.949.499,00**	**100**	**52.949.499,00**	**100**	**52.949.499,00**	**100**	**52.949.499,00**	**Kelurahan Sugihwaras**
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	2	6.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	Kelurahan Sugihwaras
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	0	1	42.630.000,00	4	51.949.499,00	4	51.949.499,00	4	51.949.499,00	4	51.949.499,00	Kelurahan Sugihwaras
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100**	**100**	**147.106.500,00**	**100**	**131.865.000,00**	**100**	**131.865.000,00**	**100**	**131.865.000,00**	**100**	**131.865.000,00**	**Kelurahan Sugihwaras**
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	1	1	300.000,00	1	340.500,00	1	340.500,00	1	340.500,00	1	340.500,00	Kelurahan Sugihwaras
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	14.400.000,00	12	14.004.000,00	12	14.004.000,00	12	14.004.000,00	12	14.004.000,00	Kelurahan Sugihwaras
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	500,00	12	520.500,00	12	520.500,00	12	520.500,00	12	520.500,00	Kelurahan Sugihwaras
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	132.406.000,00	12	117.000.000,00	12	117.000.000,00	12	117.000.000,00	12	117.000.000,00	Kelurahan Sugihwaras
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (%)**	**100**	**100**	**45.102.500,00**	**100**	**82.640.000,00**	**100**	**82.640.000,00**	**100**	**82.640.000,00**	**100**	**82.640.000,00**	**Kelurahan Sugihwaras**
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipleihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0	-	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	Kelurahan Sugihwaras

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	2	5.570.000,00	2	5.570.000,00	2	5.570.000,00	2	5.570.000,00	2	5.570.000,00	Kelurahan Sugihwaras
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	500,00	2	1.400.000,00	2	1.400.000,00	2	1.400.000,00	2	1.400.000,00	Kelurahan Sugihwaras
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	11	11	6.940.000,00	11	7.650.000,00	11	7.650.000,00	11	7.650.000,00	11	7.650.000,00	Kelurahan Sugihwaras
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	-	1	50.010.000,00	1	50.010.000,00	1	50.010.000,00	1	50.010.000,00	Kelurahan Sugihwaras
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	1	32.592.000,00	1	18.000.000,00	1	18.000.000,00	1	18.000.000,00	1	18.000.000,00	Kelurahan Sugihwaras
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**	**62,96**	**73,33**	**16.500.000,00**	**76,67**	**16.140.000,00**	**79,33**	**16.140.000,00**	**82,67**	**16.140.000,00**	**82,67**	**16.140.000,00**	**Kelurahan Sugihwaras**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sesuai ketentuan**	**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**0**	**-**	**2**	**250.000,00**	**2**	**250.000,00**	**2**	**250.000,00**	**2**	**250.000,00**	**Kelurahan Sugihwaras**
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	-	-	2	250.000,00	2	250.000,00	2	250.000,00	2	250.000,00	Kelurahan Sugihwaras
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan**	**Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Laporan / Dokumen)**	**16**	**4**	**16.500.000,00**	**2**	**15.890.000,00**	**2**	**15.890.000,00**	**2**	**15.890.000,00**	**2**	**15.890.000,00**	**Kelurahan Sugihwaras**
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	4	16.500.000,00	2	15.890.000,00	2	15.890.000,00	2	15.890.000,00	2	15.890.000,00	Kelurahan Sugihwaras

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**	**100**	**100,00**	**315.634.000,00**	**100,00**	**259.680.476,00**	**100,00**	**259.680.476,00**	**100,00**	**259.680.476,00**	**100,00**	**259.680.476,00**	**Kelurahan Sugihwaras**
			Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)	**60,00**	**65,00**		**67,25**		**70,00**		**72,50**		**72,50**		**Kelurahan Sugihwaras**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan sesuai ketentuan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan (%)**	**100**	**100**	**315.634.000,00**	**100**	**259.680.476,00**	**100**	**259.680.476,00**	**100**	**259.680.476,00**	**100**	**259.680.476,00**	**Kelurahan Sugihwaras**
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	5	5	15.634.000,00	5	11.080.040,00	5	11.080.040,00	5	11.080.040,00	5	11.080.040,00	Kelurahan Sugihwaras
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1	1	102.566.065,00	1	81.223.936,00	1	81.223.936,00	1	81.223.936,00	1	81.223.936,00	Kelurahan Sugihwaras
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5	5	197.433.935,00	5	167.376.500,00	5	167.376.500,00	5	167.376.500,00	5	167.376.500,00	Kelurahan Sugihwaras
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)**	**100,00**	**100,00**	**500,00**	**100,00**	**500.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**Kelurahan Sugihwaras**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Terlaksananya koordinasi upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum**	**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**0**	**500,00**	**2**	**500.000,00**	**2**	**500.000,00**	**2**	**500.000,00**	**2**	**500.000,00**	**Kelurahan Sugihwaras**
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	0	500,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	Kelurahan Sugihwaras
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh	0	0	-	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	Kelurahan Sugihwaras

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Agama dan Tokoh Masyarakat	Agama dan Masyarakat (Laporan)												
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama**	**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)**	**100,00**	**100,00**	**5.550.000,00**	**100,00**	**5.935.000,00**	**100,00**	**5.935.000,00**	**100,00**	**5.935.000,00**	**100,00**	**5.935.000,00**	**Kelurahan Sugihwaras**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah sesuai ketentuan**	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**4**	**3**	**5.550.000,00**	**4**	**5.935.000,00**	**4**	**5.935.000,00**	**4**	**5.935.000,00**	**4**	**5.935.000,00**	**Kelurahan Sugihwaras**
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	578	200	4.650.000,00	200	5.000.000,00	200	5.000.000,00	200	5.000.000,00	200	5.000.000,00	Kelurahan Sugihwaras
7.01.05.2.01.0005	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	0	1	900.000,00	2	935.000,00	2	935.000,00	2	935.000,00	2	935.000,00	Kelurahan Sugihwaras
	Kelurahan Widuri					**595.472.178,00**		**575.247.200,00**		**575.247.200,00**		**575.247.200,00**		**575.247.200,00**	**Kelurahan Widuri**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota**	**Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi (%)**	**100,00**	**100,00**	**326.700.178,00**	**100,00**	**341.122.200,00**	**100,00**	**341.122.200,00**	**100,00**	**341.122.200,00**	**100,00**	**341.122.200,00**	**Kelurahan Widuri**
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%)	**100,00**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**Kelurahan Widuri**
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi**	**Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi (%)**	**0**	**100**	**500,00**	**100**	**2.800.000,00**	**100**	**2.800.000,00**	**100**	**2.800.000,00**	**100**	**2.800.000,00**	**Kelurahan Widuri**
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	500,00	1	800.000,00	1	800.000,00	1	800.000,00	1	800.000,00	Kelurahan Widuri

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	-	20	2.000.000,00	20	2.000.000,00	20	2.000.000,00	20	2.000.000,00	Kelurahan Widuri
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi**	**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi (%)**	**100**	**100**	**70.170.678,00**	**100**	**82.386.200,00**	**100**	**82.386.200,00**	**100**	**82.386.200,00**	**100**	**82.386.200,00**	**Kelurahan Widuri**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	1	1	2.142.000,00	1	1.225.500,00	1	1.225.500,00	1	1.225.500,00	1	1.225.500,00	Kelurahan Widuri
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	500,00	12	497.900,00	12	497.900,00	12	497.900,00	12	497.900,00	Kelurahan Widuri
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	0	0	500,00	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	Kelurahan Widuri
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12	12	59.649.700,00	12	48.000.000,00	12	48.000.000,00	12	48.000.000,00	12	48.000.000,00	Kelurahan Widuri
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12	12	2.209.978,00	12	1.522.800,00	12	1.522.800,00	12	1.522.800,00	12	1.522.800,00	Kelurahan Widuri
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	3.168.000,00	2	2.640.000,00	2	2.640.000,00	2	2.640.000,00	2	2.640.000,00	Kelurahan Widuri
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	3.000.000,00	25	28.000.000,00	25	28.000.000,00	25	28.000.000,00	25	28.000.000,00	Kelurahan Widuri
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (%)**	**100**	**100**	**66.056.500,00**	**100**	**58.000.000,00**	**100**	**58.000.000,00**	**100**	**58.000.000,00**	**100**	**58.000.000,00**	**Kelurahan Widuri**
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	500,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	Kelurahan Widuri
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	0	1	66.056.000,00	4	53.000.000,00	4	53.000.000,00	4	53.000.000,00	4	53.000.000,00	Kelurahan Widuri
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100**	**100**	**176.721.000,00**	**100**	**123.726.000,00**	**100**	**123.726.000,00**	**100**	**123.726.000,00**	**100**	**123.726.000,00**	**Kelurahan Widuri**

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	1	1	600.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	Kelurahan Widuri
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	15.615.000,00	12	15.500.000,00	12	15.500.000,00	12	15.500.000,00	12	15.500.000,00	Kelurahan Widuri
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	-	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	Kelurahan Widuri
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	160.506.000,00	12	107.226.000,00	12	107.226.000,00	12	107.226.000,00	12	107.226.000,00	Kelurahan Widuri
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (%)**	**100**	**100**	**13.751.500,00**	**100**	**74.210.000,00**	**100**	**74.210.000,00**	**100**	**74.210.000,00**	**100**	**74.210.000,00**	**Kelurahan Widuri**
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipleihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	Kelurahan Widuri
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	2	5.670.000,00	2	4.150.000,00	2	4.150.000,00	2	4.150.000,00	2	4.150.000,00	Kelurahan Widuri
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	500,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	Kelurahan Widuri
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5	8.080.000,00	5	4.060.000,00	5	4.060.000,00	5	4.060.000,00	5	4.060.000,00	Kelurahan Widuri
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	500,00	1	59.500.000,00	1	59.500.000,00	1	59.500.000,00	1	59.500.000,00	Kelurahan Widuri
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	500,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	Kelurahan Widuri

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**	**62,96**	**73,33**	**500,00**	**76,67**	**500.000,00**	**79,33**	**500.000,00**	**82,67**	**500.000,00**	**82,67**	**500.000,00**	**Kelurahan Widuri**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sesuai ketentuan**	**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**0**	**-**	**2**	**250.000,00**	**2**	**250.000,00**	**2**	**250.000,00**	**2**	**250.000,00**	**Kelurahan Widuri**
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	0	-	2	250.000,00	2	250.000,00	2	250.000,00	2	250.000,00	Kelurahan Widuri
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan**	**Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Laporan / Dokumen)**	**0**	**0**	**500,00**	**2**	**250.000,00**	**2**	**250.000,00**	**2**	**250.000,00**	**2**	**250.000,00**	**Kelurahan Widuri**
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	0	500,00	2	250.000,00	2	250.000,00	2	250.000,00	2	250.000,00	Kelurahan Widuri
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**	**100**	**100,00**	**261.370.000,00**	**100,00**	**228.725.000,00**	**100,00**	**228.725.000,00**	**100,00**	**228.725.000,00**	**100,00**	**228.725.000,00**	**Kelurahan Widuri**
			Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)	**60,00**	**65,00**		**67,25**		**70,00**		**72,50**		**72,50**		**Kelurahan Widuri**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan sesuai ketentuan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan (%)**	**100**	**100**	**261.370.000,00**	**100**	**228.725.000,00**	**100**	**228.725.000,00**	**100**	**228.725.000,00**	**100**	**228.725.000,00**	**Kelurahan Widuri**
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	4	4	11.370.000,00	4	4.725.000,00	4	4.725.000,00	4	4.725.000,00	4	4.725.000,00	Kelurahan Widuri

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1	1	81.000.000,00	1	82.500.000,00	1	82.500.000,00	1	82.500.000,00	1	82.500.000,00	Kelurahan Widuri
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4	4	169.000.000,00	4	141.500.000,00	4	141.500.000,00	4	141.500.000,00	4	141.500.000,00	Kelurahan Widuri
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)**	**100,00**	**100,00**	**1.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**Kelurahan Widuri**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Terlaksananya koordinasi upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum**	**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**0**	**1.000,00**	**2**	**500.000,00**	**2**	**500.000,00**	**2**	**500.000,00**	**2**	**500.000,00**	**Kelurahan Widuri**
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	0	500,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	Kelurahan Widuri
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat (Laporan)	0	0	500,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	Kelurahan Widuri
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama**	**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)**	**100,00**	**100,00**	**7.400.500,00**	**100,00**	**4.400.000,00**	**100,00**	**4.400.000,00**	**100,00**	**4.400.000,00**	**100,00**	**4.400.000,00**	**Kelurahan Widuri**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah sesuai ketentuan**	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**4**	**2**	**7.400.500,00**	**4**	**4.400.000,00**	**4**	**4.400.000,00**	**4**	**4.400.000,00**	**4**	**4.400.000,00**	**Kelurahan Widuri**
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara	1040	96	7.400.000,00	96	4.200.000,00	96	4.200.000,00	96	4.200.000,00	96	4.200.000,00	Kelurahan Widuri

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)												
7.01.05.2.01.0005	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	0	0	500,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	Kelurahan Widuri

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama, RPJMD, dan Pendanaan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3.
Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
2	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	
			Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
3	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum**	**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama**	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	
			Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
			Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
6	**Program Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintahan Desa**	**Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa**	**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
			Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pemalang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pemalang

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN KE						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Desa dengan Status Mandiri di Wilayah Kecamatan	%	46,15	61,54	76,92	100	100	100	100	
2	IKM	Nilai	86,39	86,50	86,65	86,85	87,10	87,40	87,40	
3	Nilai SAKIP OPD	Nilai	65,02	65,10	65,20	65,30	65,40	65,50	65,50	

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pemalang Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Persentase Desa dengan Status Mandiri di Wilayah Kecamatan Pemalang dengan Formula/Rumus Indikator jumlah desa di Kecamatan yang memiliki status desa mandiri/jumlah desa yang ada di Kecamatan pemelang di kali 100. Target desa dengan status mandiri sudah bisa mencapai 100 % di Tahun 2027 karena memang di Tahun 2024 Desa yang berstatus mandiri sudah 6 Desa dan total 13 Desa di Kecamatan Pemalang.Peningkatan status ditargetkan meningkat setiap tahunnya seperti yang ada di Tabel 4.4

https://jdih.pemalangkab.go.id

2. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), Nilai ini diperoleh dari Survei Kepuasan masyarakat (masyarakat adalah Pemohon yang mengajukan permohonan di Kecamatan Pemalang). Survei dilaksanakan setahun 2 kali yaitu SKM Semester I dan Sementer II setiap tahunnya.
3. Nilai Sakip OPD, Nilai SAKIP OPD diperoleh dari hasil penilaian Inspektorat terhadap Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pemalang.

4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja kunci (IKK) adalah urusan keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Pemalang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Pemalang

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2929	2030	
NIHIL										

IKK (Indikator Kinerja Kunci) Kecamatan Pemalang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 -2029 untuk IKK (Indikator Kinerja Kunci) Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 adalah NIHIL.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan periode Tahun 2025-2029 dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pemalang yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029. Sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian dan Renstra PD Kabupaten Pemalang yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan di Kabupaten Pemalang.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Kecamatan Pemalang ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Pemalang. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman bersama dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Pemalang serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Pemalang. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Pemalang merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan dan/atau target kinerja sasaran Kecamatan Pemalang. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Kecamatan Pemalang yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Pemalang harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Kecamatan Pemalang. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Kecamatan Pemalang di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Pemalang ini.

Pemalang, 8 September 2025
CAMAT PEMALANG

PRASETYO WIDYATMOKO, S.IP
Pembina Tk. I
NIP. 19690318 199803 1 012

https://jdih.pemalangkab.go.id

BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR: 100.3.3.2/182/ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025–2029,
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026, DAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2029, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026, dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a dan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tahapan persiapan penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah diawali dengan penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

https://jdih.pemalangkab.go.id

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2045;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026, dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menginterpretasikan visi, misi, dan RPJMD ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah serta menyusun arah kebijakan dan strategi program perangkat daerah yang mendukung pencapaian RPJMD;
b. menghimpun dan menganalisis dokumen, data, dan informasi pendukung untuk perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menerjemahkan target tahunan Renstra Perangkat Daerah ke dalam Renja tahun 2026;
d. mengintegrasikan hasil musrenbang dan pokok pikiran DPRD yang relevan dengan tugas dan fungsi Perangkat

Daerah;

e. melakukan harmonisasi Renja antar Perangkat Daerah melalui Forum Perangkat Daerah;

f. merumuskan dan menyusun dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Lingkup Pemerintah Kabupaten Pemalang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. melakukan pengendalian kebijakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Pemalang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 26 Mei 2025

BUPATI PEMALANG,

ANOM WIDIYANTORO

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR: 100.3.3.2/182/TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029, RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026, DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029, RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026, DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

1. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Sekretaris Daerah
2.	Wakil Ketua	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi Umum
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Keuangan
	b. Anggota	1. Kepala Bagian Tata Usaha 2. Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Program Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat	
	a. Ketua	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
	b. Anggota	1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Umum 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Program Perekonomian dan Pembangunan	
	a. Ketua	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	b. Anggota	1. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan 2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	a. Ketua	Kepala Bagian Organisasi
	b. Anggota	1. Kepala Bagian Umum 2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 3. Kepala Subbagian Protokol 4. Pejabat Fungsional/Pelaksana

https://jdih.pemalangkab.go.id

2. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Sekretaris DPRD
2.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Program dan Keuangan
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Umum
4.	Anggota	1. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan 2. Kepala Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat 3. Kepala Subbagian Keuangan 4. Kepala Subbagian Tata Usaha 5. Pejabat Fungsional/Pelaksana

3. INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Inspektur
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Program, Keuangan dan Umum
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
	b. Anggota	1. Subkoordinator Perencana dan Bina Program 2. Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Penyelenggaraan Pengawasan	
	a. Ketua	Inspektur Pembantu I
	b. Anggota	1. Inspektur Pembantu Wilayah II 2. Auditor 3. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUD) 4. Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
	a. Ketua	Inspektur Pembantu Wilayah III
	b. Anggota	1. Inspektur Pembantu Wilayah Khusus 2. Auditor 3. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUD) 4. Pelaksana

4. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Keuangan

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini 2. Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan Dan Masyarakat 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Sekolah Dasar 2. Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Sarana Prasarana	
	a. Ketua	Kepala Bidang Sarana Prasarana
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan, dan Kemasyarakatan 2. Kepala Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja V Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Mutasi Tenaga Pendidik 2. Kepala Seksi Pengembangan Profesi Tenaga Pendidik 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
9.	Kelompok Kerja VI Bidang Kebudayaan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kebudayaan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional

5. DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pemuda dan Olah Raga	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Unit Pengelola Objek Wisata	
	a. Ketua	Kepala Unit
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

6. DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Kesehatan Masyarakat	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Kesehatan Masyarakat	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja V Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
9.	Kelompok Kerja VI Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

7. DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Dan Jaminan Sosial
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Rehabilitasi Sosial	
	a. Ketua	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja IV Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
9.	Kelompok Kerja V Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

8. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

9. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Penataan Desa	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Penataan Desa
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pemerintahan Desa	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemerintahan Desa
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

10. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
	Anggota	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Pelaksana

https://jdih.pemalangkab.go.id

11. DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program Dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja III Bidang Koperasi	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Koperasi
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pemerintahan Desa	
	a. Ketua	Kepala Bidang Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Perdagangan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perdagangan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja V Bidang Perindustrian	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perindustrian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

12. DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi	
	a. Ketua	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
	a. Ketua	Kepala Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

https://jdih.pemalangkab.go.id

13. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua Pokja	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Penyelernggaraan *E-Government*	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Penyelernggaraan *E-Government*
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Statistik dan Persandian	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

14. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Sumber Daya Air	
	a. Ketua	Kepala Bidang Sumber Daya Air
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksan
6.	Kelompok Kerja III Bidang Bina Marga	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bina Marga
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Jasa Konstruksi, Cipta Karya, dan Tata Ruang	
	a. Ketua	Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Cipta Karya, dan Tata Ruang
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

https://jdih.pemalangkab.go.id

15. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Perumahan dan Pertanahan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perumahan dan Pertanahan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Kawasan Permukiman	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kawasan Permukiman
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

16. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Angkutan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Angkutan
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Angkutan Penumpang dan Barang 2. Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Keselamatan 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Lalu Lintas	
	a. Ketua	Kepala Bidang Lalu Lintas
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas 2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana

17. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas	
	a. Ketua	Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

18. DINAS PERTANIAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Ketahanan Pangan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
	a. Ketua	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Perkebunan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Perkebunan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
8.	Kelompok Kerja V Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
9.	Kelompok Kerja VI Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

https://jdih.pemalangkab.go.id

19. DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

20. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Perpustakaan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perpustakaan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Arsip	
	a. Ketua	Kepala Bidang Arsip
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

21. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Satpol PP
2.	Wakil Ketua	Sekretaris

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pembinaan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pembinaan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan 2. Kepala Seksi Pengawasan, Penegakan dan Penindakan 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	
	a. Ketua	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Perlindungan dan Pemadam Kebakaran	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemadam Kebakaran
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Satuan Perlindungan dan Bina Potensi Masyarakat 2. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana

22. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
	a. Ketua	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja V Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
9.	Kelompok Kerja VI Unit Penelitian dan Pengembangan	
	a. Ketua	Kepala Unit
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

23. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Anggaran	
	a. Ketua	Kepala Bidang Anggaran
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran 2. Kepala Subbidang Evaluasi dan Penyusunan Anggaran 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Perbendaharaan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perbendaharaan
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Penatausahaan Pencarian Dana 2. Kepala Subbidang Penatausahaan Bendahara Umum Daerah 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Akutansi dan Aset Daerah	
	a. Ketua	Kepala Bidang Akutansi Dan Aset Daerah
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Akuntansi dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		Pelaporan 2. Kepala Subbidang Aset Daerah 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana

24. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pelayanan dan Penataan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pelayanan dan Penataan
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Pelayanan dan Pendataan Pajak Daerah Lainnya 2. Kepala Subbidang Pelayanan dan Pendataan PBB-P2 dan BPHTB 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pengolahan Data dan Penetapan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengolahan Data dan Penetapan
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Analisa, Pengembangan dan Pengolahan Data 2. Kepala Subbidang Penetapan, Verifikasi dan Keberatan 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Penagihan dan Pengendalian	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Penagihan dan Pengendalian
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Penyuluhan dan Penagihan 2. Kepala Subbidang Pengendalian dan Pelaporan 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana

25. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Sekretaris

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
6.	Kelompok Kerja III Bidang Mutasi dan Promosi	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Mutasi dan Promosi
	b. Anggota	Jabatan Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pengembangan Aparatur	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Pengembangan Aparatur
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja V Unit Bidang Disiplin dan Kinerja Aparatur	
	a. Ketua	Kepala Bidang Disiplin dan Kinerja Aparatur
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

26. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Pengarah
3.	Sekretaris	Kepala Pelaksana
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
	b. Anggota	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 2. Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Kedaruratan dan Logistik	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
	a. Ketua	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

27. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Badan
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Kesatuan Bangsa	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
7.	Kelompok Kerja V Unit Pelaksana Teknis Daerah	
	a. Ketua	Kepala UPTD
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

28. KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

29. KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

30. KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

31. KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

https://jdih.pemalangkab.go.id

32. KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

33. KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

34. KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman Dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

35. KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua Pokja	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabaat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

36. KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua Pokja	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		Pelayanan

37. KECAMATAN WARUNGPRING KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

38. KECAMATAN MOGA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

39. KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

40. KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua Pokja	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

41. KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

BUPATI PEMALANG,

ANOM WIDIYANTORO

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

Nomor : 007.2/ 3458 / Bappeda

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR URUSAN DAN PROGRAM PENUNJANG KABUPATEN PEMALANG

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, perlu menetapkan Indikator Urusan dan Program Penunjang perangkat daerah;
b. bahwa penetapan Indikator Urusan dan Program Penunjang sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diub ah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor l94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7);

Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.pemalangkab.go.id

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR URUSAN DAN PROGRAM PENUNJANG KABUPATEN PEMALANG.

PERTAMA : Indikator Urusan dan Program Penunjang sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini merupakan indikator program penunjang yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pemalang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 29 Agustus 2025

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PEMALANG

Dr. Drs. MOH. SIDIK, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660923 199303 1 003

Tembusan :
1. Bupati Pemalang (sebagai laporan);
2. Kepala Inspektorat Kab. Pemalang;
3. Semua Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Pemalang;
4. Kasubag Umum pada Bappeda Kab. Pemalang.

Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.pemalangkab.go.id

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor : 007.2/3458/Bappeda
Tanggal : 29 Agustus 2025

INDIKATOR URUSAN DAN PROGRAM PENUNJANG KABUPATEN PEMALANG

SASARAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
	Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	Skor Sakip OPD

PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELUARAN	HASIL	KLASIFIKASI
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian Yang Terpenuhi	%			Layanan umum yang dipenuhi dibagi layanan umum yang dibutuhkan dikali 100
		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi	%			Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi dibagi jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja yang disusun dikali 100

Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.pemalangkab.go.id

PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELUARAN	HASIL	KLASIFIKASI
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai regulasi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai regulasi	Dokumen	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai regulasi	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	
X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			Renja, Perubahan Renja, Renstra
X.XX.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen			RKA
X.XX.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen			RKAP, Perubahan dan Pergeseran
X.XX.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen			DPA
X.XX.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen			DPPA

Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.pemalangkab.go.id

PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELUARAN	HASIL	KLASIFIKASI
X.XX.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan			Capaian kinerja Triwulanan (PK Triwulanan), Daloptan, LKjIP, LPPD, LKPJ
X.XX.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan			Evaluasi Renja, Evaluasi Renstra, Evaluasi RKPD, SPIP Terintegrasi
X.XX.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara			Berita Acara Forum PD
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi	Persentase Dokumen Keuangan disusun sesuai regulasi	%	Dokumen Keuangan yang disusun sesuai regulasi	Tertibnya administrasi keuangan perangkat daerah	
X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan			Laporan/leger gaji

Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.pemalangkab.go.id

PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELUARAN	HASIL	KLASIFIKASI
X.XX.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen			1. SK penetapan Koordinator Pengelolaan Keuda, PPKD, PA, KPA dan Bendahara SKPD 2. SK penetapan Pengelola Barang, Pjbt penatausahaan barang pengelola, Pengguna barang, Pjbt penatausahaan barang pengguna, pengurus barang SKPD 3. SK penetapan Bendahara BOS pada Satdikdas
X.XX.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen			Jumlah dokumen yang terverifikasi (bulanan)

Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.pemalangkab.go.id

PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELUARAN	HASIL	KLASIFIKASI
X.XX.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan			Laporan Keuangan Tahunan (1)
X.XX.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen			Dokumen TL LHP BPKP
X.XX.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan			Laporan Keuangan Bulanan (12), Laporan Keuangan Triwulanan, Laporan Keuangan Semesteran
X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai regulasi	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah disusun sesuai regulasi	%	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah disusun sesuai regulasi	Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
X.XX.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Laporan semesteran dan laporan tahunan kondisi aset		Penghitungan seluruh aset, penghapusan aset, pemantauan kondisi aset, entry kebutuhan aset bmd yaitu berupa barang dan bangunan

Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.pemalangkab.go.id

PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELUARAN	HASIL	KLASIFIKASI
X.XX.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan			Laporan semesteran BMD
X.XX.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah sesuai regulasi	Persentase Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah disusun sesuai regulasi	%	Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah disusun sesuai regulasi	Tertibnya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
X.XX.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	Laporan pengelolaan retribusi		Laporan retribusi sewa rumah susun
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	%	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	Tertibnya Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
X.XX.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket			Paket pakaian
X.XX.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Dokumen kepegawaian		Kenaikan pangkat profil kepegawaian setda
X.XX.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang			Pegawai yang mengikuti diklat

Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.pemalangkab.go.id

PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELUARAN	HASIL	KLASIFIKASI
X.XX.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			Orang yang mengikuti sosialisasi, laporan sosialisasi peraturan perundang-undangan
X.XX.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			Orang yang mengikuti bimtek
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi	Persentase Fasilitasi Administrasi umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi	%	Fasilitasi Administrasi umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan sesuai regulasi	Meningkatnya efektifitas pelayanan internal Perangkat Daerah	
X.XX.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket			Komponen listrik (kabel, lampu)
X.XX.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			Aksesoris komputer (mouse, tinta printer, flashdisk, Hardisk, charger)
X.XX.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			Teko, Panci, Piring, Gelas, Peralatan kebersihan (sapu, pacul, pel) dll

Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.pemalangkab.go.id

PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELUARAN	HASIL	KLASIFIKASI
X.XX.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			Obat-obatan, Suplemen, Gula, Teh, Kopi, Cairan pembersih, minum harian
X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			Buku/dokumen
X.XX.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen			Buku/surat kabar
X.XX.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan			Snack, Makan Prasmanan, Akomodasi
X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			Notolen rapat, Mamin Rapat, SPPD
X.XX.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen			Laporan Penatausahaan Arsip Tahunan (1)
X.XX.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen			Peningkatan kapasitas admin IT puspindes, sidekem
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	%	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana bagi kelancaran tugas Perangkat Daerah	

Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.pemalangkab.go.id

PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELUARAN	HASIL	KLASIFIKASI
X.XX.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit			Mobil, sepeda motor
X.XX.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit			Mobil, sepeda motor
X.XX.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit			Excavator
X.XX.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit			Meja Kursi, Lemari
X.XX.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit			Genset, Telpon, Kamera, Drone, printer, laptop, komputer, AC, TV, Kulkas, proyektor
X.XX.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			Gedung kantor
X.XX.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			Tempat parkir, pagar, pos satpam, taman, tempat ibadah
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	%	Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan kualitas operasional Pemerintahan Daerah	
X.XX.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan			Laporan surat masuk dan surat keluar

Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.pemalangkab.go.id

PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELUARAN	HASIL	KLASIFIKASI
X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			Telepon, Listrik, Internet, Air
X.XX.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan			Laporan Penyediaan Jasa Peralatan (AC, Komputer, laptop, TV, LCD)
X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			Tenaga Honorer
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	%	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Terjaminnya ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang layak pakai	
X.XX.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit			Pajak Kendaraan Bermotor
X.XX.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			KIR/lainnya

Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.pemalangkab.go.id

PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	KELUARAN	HASIL	KLASIFIKASI
X.XX.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit			Perizinan Excavator, Bulldozer
X.XX.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit			Pemeliharaan mebel
X.XX.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			Service Laptop, Genset, AC
X.XX.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit			Pemeliharaan aplikasi
X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			Pemeliharaan gedung
X.XX.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			Pemeliharaan tepat parkir, pemeliharaan tempat ibadah, pemeliharaan pagar, pemeliharaan pos satpam, dll.

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PEMALANG

Dr. Drs. MOH. SIDIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660923 199303 1 003

Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasar pasal 221 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Dengan terlayaninya berbagai kebutuhan administrasi masyarakat diharapkan dapat memperlancar berbagai urusan masyarakat. Kecamatan juga melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sehingga pemerintahan desa dapat lebih optimal dalam memajukan desanya dan mensejahterakan masyarakatnya. Agar tujuan tersebut dapat tercapai harus didukung oleh perencanaan yang baik sehingga perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

Kecamatan Taman sebagai salah satu PD harus menyusun Renstra. Penyusunan Renstra Kecamatan Taman sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kecamatan Taman disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kementerian dan Renstra PD Kabupaten Pemalang yang terkait.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Taman untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Taman serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Renstra menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Taman selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan pelayanan publik yang baik dan mewujudkan masyarakat desa/kelurahan yang berdaya.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Penyusunan Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Kecamatan Taman, dimana kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Taman harus mendukung kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai.

Proses penyusunan Renstra meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1) Persiapan Penyusunan Renstra PD, terdiri dari pembentukan tim penyusun Renstra PD, orientasi mengenai Renstra PD, agenda kerja tim penyusun Renstra PD, penyiapan data dan informasi; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD; (3) Penyusunan Rancangan Renstra PD; (4) Forum Perangkat Daerah; (5) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD; dan (6) Penetapan Renstra PD.

Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 disajikan dalam bagan berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029

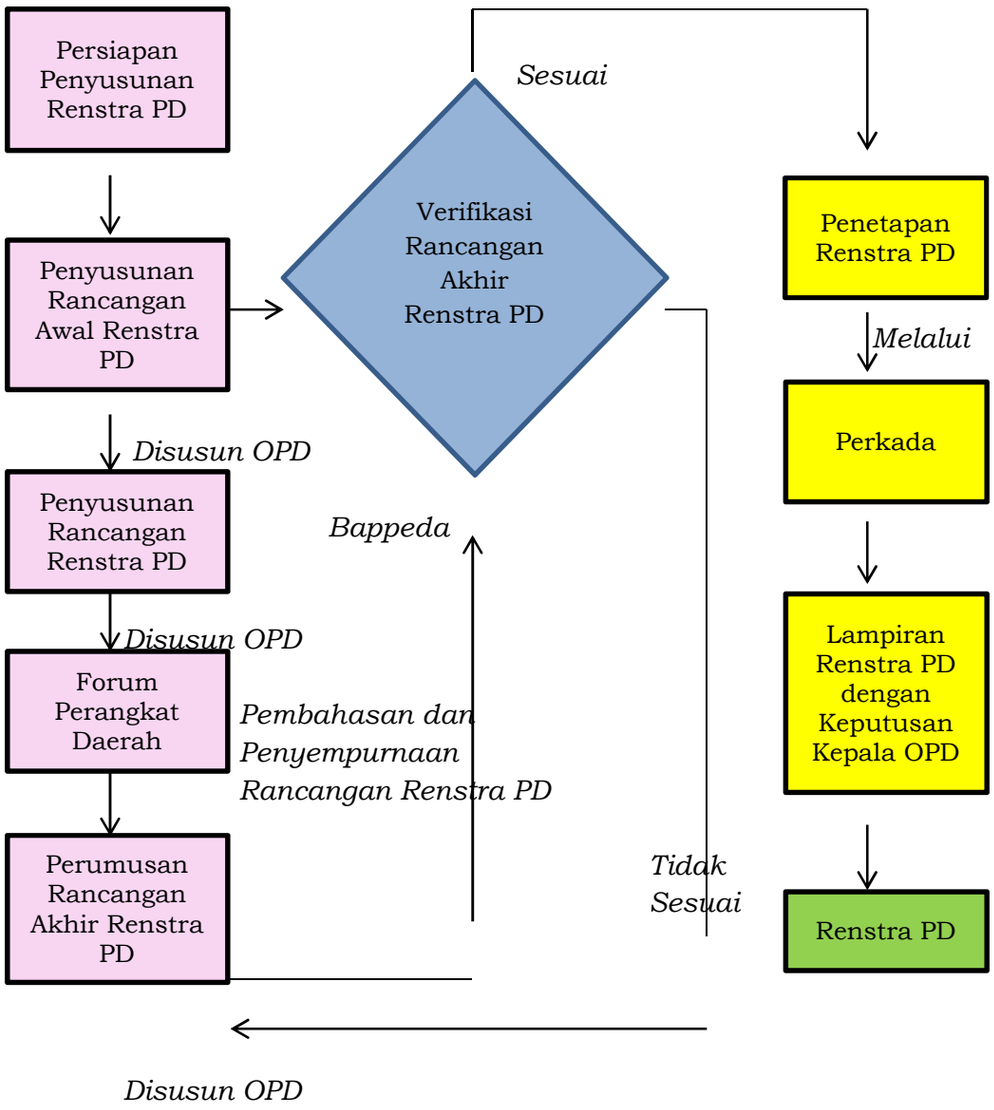

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah)

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dokumen Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang. Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut :

Gambar 1.2
Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

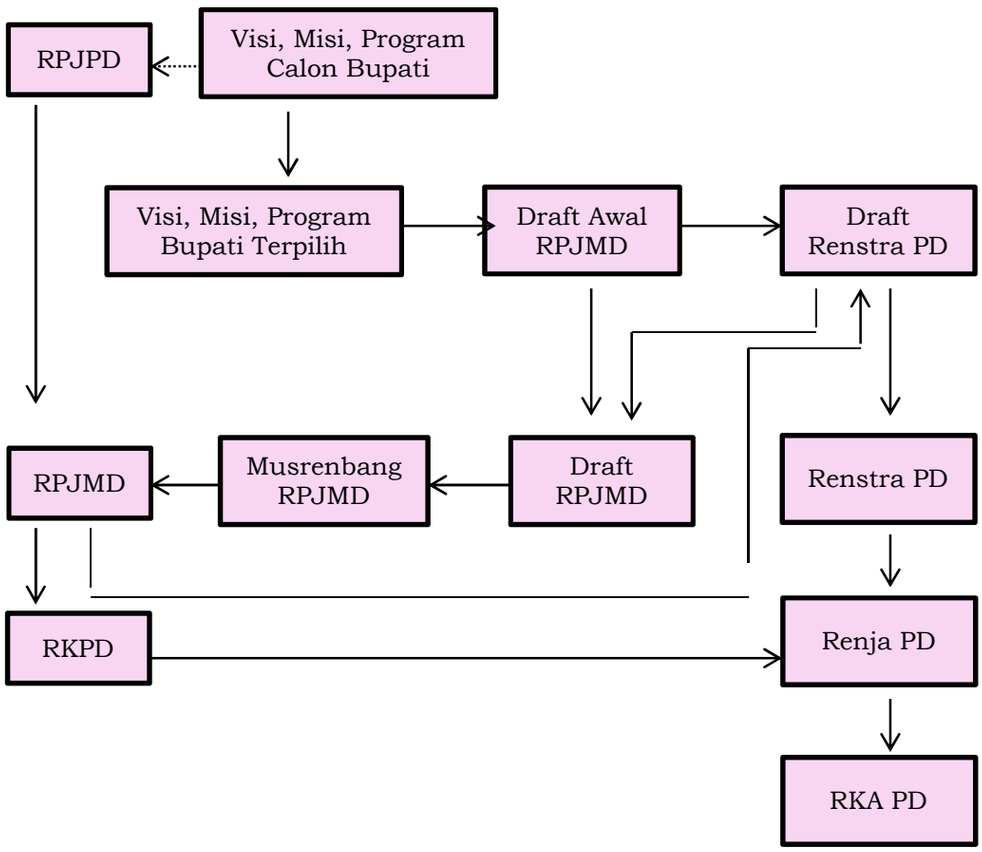

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimanation Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

https://jdih.pemalangkab.go.id

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

https://jdih.pemalangkab.go.id

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);

https://jdih.pemalangkab.go.id

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 60;
35. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
36. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
37. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 adalah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah melalui peningkatan pelayanan kecamatan yang prima.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Taman untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah di Unsur Kewilayahan;
2. Menjadi ajuan kerja resmi bagi Kecamatan Taman serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Unsur Kewilayahan;
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Kecamatan Taman.

https://jdih.pemalangkab.go.id

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Watukumpul, berisi gambaran pelayanan perangkat daerah paling sedikit memuat: tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Watukumpul, sumber daya Kecamatan Watukumpul, kinerja pelayanan Kecamatan Watukumpul, permasalahan pelayanan Kecamatan Watukumpul, isu strategis Kecamatan Watukumpul dan telaah visi misi Bupati dan Wakil Bupati.
3. Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, berisi tentang tujuan Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029, sasaran renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029, serta strategi dan arah kebijakan Kecamatan Watukumpul dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029.
4. Bab IV Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, berisi uraian program, uraian kegiatan, uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Watukumpul.
5. Bab V Penutup, berisi Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TAMAN

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Taman

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Taman

Kecamatan Taman dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Taman mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Taman

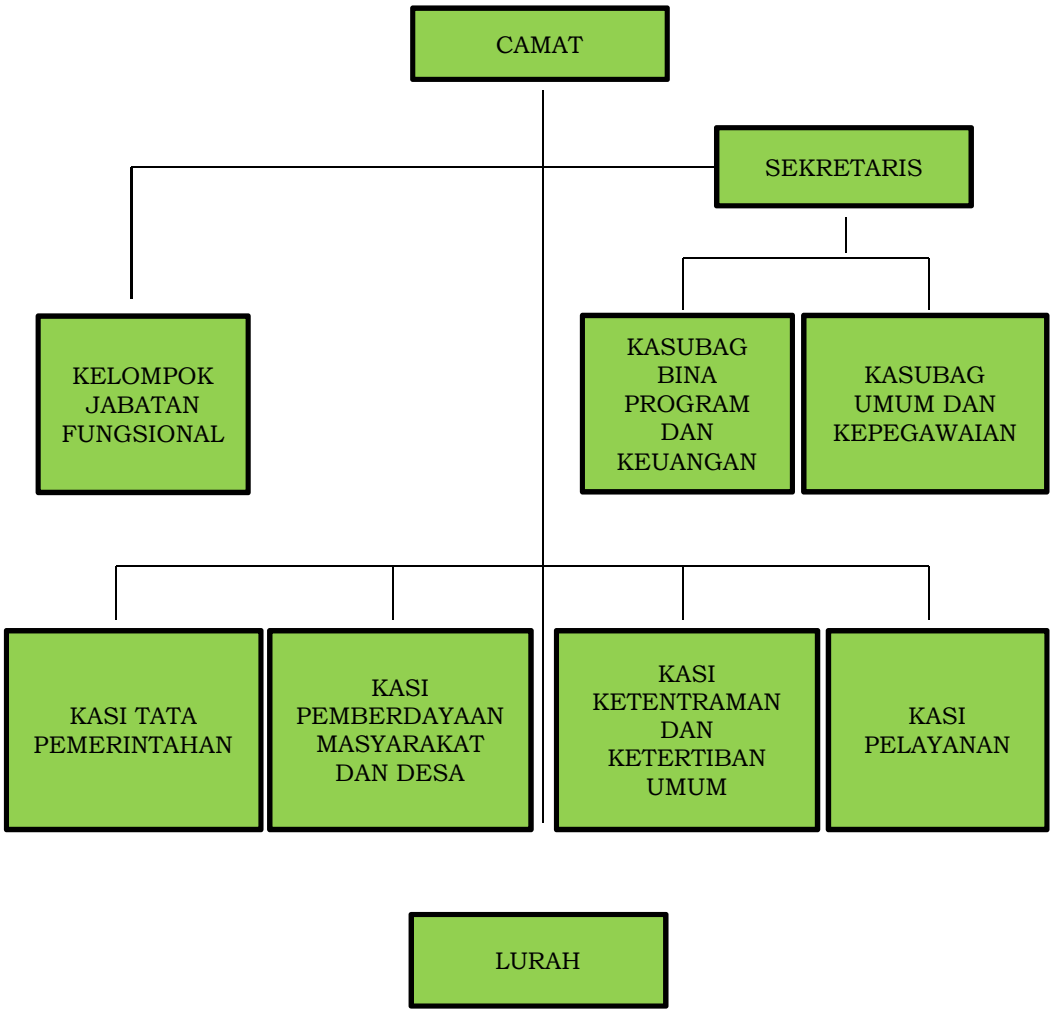

Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

A. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Camat mempunyai uraian tugas :

1. Mengarahkan penyusunan dokumen perencanaan kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan organisasi, perencanaan partisipatif dan perencanaan yang lebih tinggi dan ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Merumuskan kebijakan kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Merumuskan inovasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
4. Mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan kecamatan, meliputi kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum,

https://jdih.pemalangkab.go.id

pelayanan umum dan kesekretariatan sesuai dengan tugas fungsi dan pedoman pelaksanaan agar tepat sasaran dan tujuan;

5. Mengarahkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan dengan melalui bimbingan, supervisi, fasilitasi dan evaluasi guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan;
6. Mengarahkan penyediaan dan pelayaan informasi publik serta penyusunan data dan informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
7. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsinya guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh PD kabupaten yang ada di kecamatan sesuai dengan petunjuk pimpinan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
9. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan Peraturan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
10. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Merumuskan laporan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kerja organisasi.

B. Sekretaris Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan kesekretariatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;

https://jdih.pemalangkab.go.id

2. Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian sesuai dengan kebituhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
5. Mengoordinasikan penyusunan kondep inovasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
9. Melaksanakan tugas dan kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
    a. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :
        1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
        2. Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
        3. Menyusun konsep dokumen perencanaan Kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen

https://jdih.pemalangkab.go.id

perencanaan lain berdasarkan kebutuhan oprganisasi, perencanaan partisipatif, dan perencanaanyang lebih tinggi guna dirumuskan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

4. Menyusun konsep laporan capaian kinerja Kecamatan yang meliputi LkjIP, laporan pelaksanaan APBD dan laporan kinerja lain berdasarkan Renja dan realisasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban;
5. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib adminstrasi;
6. Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan keuangan;
7. Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi LRA, LO, LPE, neraca dan CaLK serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;
8. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
10. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kecamata sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepasa pimpinan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

https://jdih.pemalangkab.go.id

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai sengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengelola kegiatan administrasi surat menyurat, kepegawaian, penataan arsip, dokumentas, dan kearsipan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
4. Mengelola kegiatan kerumahtanggaan meliputi penyediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, pelayanan tamu dinas dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Mengelola administrasi barang milik daerah yang meliputi penyusunan analisa kebutuhan dan pemeliharaan barang, penatausahaan barang, dan penyusunan administrasi barang lainnya sesuai dengan peraturan pengelolaan barang milik daerah guna tertib administrasi;
6. Mengelola kegiatan ketatalaksanaan meliputi penyusunan standart dan prosedur kerja sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Mengelola kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi penyediaan dan pelayanan informasi publik, penyusunan data informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian, pengaturan tata tempat dan tata acara serta kegiatan kehumasan dan keprotokolan lain sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

https://jdih.pemalangkab.go.id

10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

C. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta, dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan memeriksa berkas yang diajukan kepala desa sebagai bahan konsultasi kepada pimpinan guna disahkan oleh pimpinan;
5. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan melalui fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, fasilitasi pemberian tunjangan perangkat desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;
6. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Seksi Tata Pemerintahan meliputi data monografi desa, data perangkat desa dan data terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi publik

https://jdih.pemalangkab.go.id

dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;

8. Menyusun konsep motivasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

D. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, keagamaan, pembinaan kesehatan, keluarga berencana, organisasi perempuan, pendidikan, pemuda dan olahraga dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan sosial desa melalui fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pembangunan desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjaama desa dengan pihak ketiga, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, koordinasi pendampingan desa, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan organisasi

https://jdih.pemalangkab.go.id

kemasyarakatan desa bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial guna tertib administrasi dan kelancaran dan penyelenggaraan pemerintahan desa;

5. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dengan melibatkan stakeholder terkait demi tercapainya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran;
6. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan dan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawabkan kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

E. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan meliputi fasilitasi pengaduan masyarakat, kejadian musibag, bencana umum atau kejadian luar biasa lainnya serta upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lainnya dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional

https://jdih.pemalangkab.go.id

Indonesia dan pemuka agama/tokoh masyarakat serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum;

4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau desa/kelurahan serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna tegaknya peraturan;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah yang ada di wilayah kecamatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dan/atau swasta dan/atau pihak terkait lainnya sesuai dengan prosesur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keamanan dan terpeliharanya prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah;
6. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan yang bergerak di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
7. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kebutuhan informasi publik;
9. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

F. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan kegiatan koordinasi terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan dan kabupaten, pemerintah desa/kelurahan, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep rencana operasional dan standar pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
5. Melaksanakan kegiatan fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan di bidang perizinan, non perizinan, administrasi pertanahan dan pelayanan administrasi lainnya sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dan pemeriksaan dokumen/berkas permohonan, cek lokasi apabila disyaratkan, pengesahan hingga penyampaian kembali dokumen/berkas kepada pemohon guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
6. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan prosedur dan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
7. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tercapainya kepuasan masyarakat;
8. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
9. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan melalui analisis potensi dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;

10. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Taman

Sumber daya Kecamatan Taman sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

a. Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Jumlah pegawai di Kecamatan Taman dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyakatan sosial tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.
Pegawai Kecamatan Taman

NO	JABATAN	Laki-laik	Perempuan	GOLONGAN				JUMLAH
				I	II	III	IV	
Kecamatan Taman								
1	Camat	1					1	1 orang
2.	Sekretaris Kecamatan	1				1		1 orang
3	Kepala Seksi	3				3		3 orang
4	Kepala Sub Bagian	2				2		2 orang
5	JFU kecamatan	3	4		1	6		7 orang
6	Non ASN kecamatan	9	5	14				14 orang
Kelurahan								
7	Lurah	1				1		1 orang
8.	Sekretaris Kelurahan		1			1		1 orang
9.	Kepala Seksi Kelurahan		4			4		4 orang
10.	JFU kelurahan	7	3	1	5	4		10 orang
11.	Non ASN kelurahan	20	10	30				30 orang
	JUMLAH	47	27	45	6	22	1	74 orang

Sumber: *Sekretariat Kec.Taman, 2025*

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pegawai Kecamatan Taman berjumlah 74 orang, meliputi 47 orang laki-laki dan 27 orang perempuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Taman dominan laki-laki yaitu sebanyak 57 %. Agar kecamatan Taman menerapkan responsif gender, untuk perekrutan tenaga non ASN selanjutnya disarankan berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya jumlah pegawai berdasar golongan, meliputi golongan I sebanyak 45 orang golongan II sebanyak 6 orang, golongan III sebanyak 22 orang dan golongan IV sebanyak 1 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Taman dominan bergolongan I yaitu sebanyak 64 %.

Tabel 2.2.
Data Pegawai Berdasar Diklat Kepemimpinan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Diklatpim III	1	1	-
2	Diklatpim IV	-	-	-
3	ADUM	-	-	-
4	SEPADA	-	-	-
5	Struktural yang belum diklat	5	5	-
Jumlah		6	6	-

Sumber : Sekretariat Kecamatan Taman, 2025

Jumlah pegawai berdasarkan diklat kepemimpinan pada Kecamatan Taman, yaitu 1 orang sudah mengikuti Diklatpim III, sedangkan orang yang sudah mengikuti Diklatpim IV, ADUM, SEPADA belum ada, struktural yang belum diklat 5, hal ini disebabkan masih menunggu penyelenggaraan diklat dari instansi yang berwenang.

Tabel 2.3.
Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

No	**Pendidikan**	**Jumlah**	**Jenis Kelamin**	
			Laki-laki	**Perempuan**
1.	Pasca Sarjana (S2)	2	2	-
2.	Sarjana (S1)	16	8	8
3.	Diploma	4	1	3
4.	SLTA	19	14	5
5.	SLTP	1	1	-
6.	SD	2	2	-
Jumlah		44	28	16

Sumber: Sekretariat Kec.Taman, 2025

Jumlah pegawai Kecamatan Taman berdasar tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S2) sebanyak 2 orang, Sarjana (S1) sebanyak 14 orang, Diploma sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 11 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara kualitas SDM di Kecamatan Taman sudah tercukupi, yaitu dengan dominasi berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 46 %.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.4.
Data Pegawai Berdasar Tingkat Eselon

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	IIIA	1	1	-
2	IIIB	1	1	-
3	IVA	4	4	-
4	IVB	1	1	-
Jumlah		7	7	-

Sumber : Sekretariat Kecamatan Taman, 2025

Jumlah pegawai Kecamatan Taman berdasarkan tingkat eselon, yaitu Eselon IIIA sebanyak 1 orang, Eselon IIIB sebanyak 1 orang, Eselon IVA sebanyak 4 orang, Eselon IVB sebanyak 6 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Kecamatan Taman berdasarkan tingkat eselon dominan esselon IVA yaitu sebanyak 57 %.

Untuk meningkatkan kapasitas SDM yang ada, Kecamatan Taman telah melaksanakan kegiatan pengembangan SDM yang tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.5.
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kecamatan Taman Tahun 2023-2024

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		Realisasi		Rasio		Uraian Permasalahan
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota							
	- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2.000.000	5.000.000	2.000.000	5.000.000	100%	100%	
	- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	2.000.400	5.000.000	2.000.400	5.000.000	100%	100%	
	- Evaluasi kinerja perangkat daerah	2.000.400	5.000.000	2.000.400	5.000.000	100%	100%	
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik							
	- Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	2.100.080	2.000.000	2.100.080	2.000.000	100%	100%	
3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan							
	- Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	25.000.100	1.600.000	25.000.100	1.600.000	100%	100%	
4	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum							
	- Sinergitas dengan kepolisian negara RI, tentara nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan	2.000.000	2.500.000	2.000.000	2.500.000	100%	100%	
5	Program penyelenggaraan urusan							

https://jdih.pemalangkab.go.id

	pemerintahan umum							
	- Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara 1945	17.000.000	30.000.000	17.000.000	30.000.000	100%	100%	
	- Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	2.000.120	5.000.000	2.000.120	5.000.000	100%	100%	
6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa							
	- Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	2.000.400	2.000.000	2.000.400	2.000.000	100%	100%	
	- Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100%	100%	
	- Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	2.000.000	5.000.000	2.000.000	5.000.000	100%	100%	
	- Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100%	100%	
	- Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100%	100%	

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

b. Sarana dan Prasarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Kecamatan Taman dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6.
Inventaris Aset Kecamatan Taman

No	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Jumlah Harga (Rp)
					Baik	Sedang	Rusak	
1	01		Tanah					
		01	Tanah	3				17.111.703.000,00
			Jumlah KIB A					17.111.703.000,00
2	01		Peralatan dan Mesin					
		02	Alat-alat Besar	1	1			89.250.500,00
		03	Alat-alat Angkutan	12	12			728.551.528,00
		04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	-				-
		05	Alat Pertanian	-				2.800.000,00
		06	Alat Kantor & Rumah Tangga	581	581			885.083.791,00
		07	Alat Studia & Alat Komunikasi	20	20			56.940.500,00
		08	Alat-alat Kedokteran	1	1			900.000,00
		09	Komputer	9	9			524.225.606,00
		10	Alat Laboratorium					-
			Jumlah KIB B					2.287.751.925,00
3	03		Gedung dan Bangunan					-
		11	Bangunan Gedung	8	7	1		2.652.133.900
		12	Monumen	1	1			196.000.000,00
			Jumlah KIB C					3.037.763.900,00
4	04		Jalan, Irigasi dan Jaringan	6	6			-
		13	Jalan & Jembatan					1.777.403.373,00
		14	Bangunan Air/Irigasi					1.229.518.750,00
		15	Instalasi	2	2			2.200.000,00
		16	Jaringan	4	4			73.836.000,00
			Jumlah KIB D					3.082.958.123,00
5	05		Aset Tetap Lainnya	493				
		17	Buku dan Perpustakaan	420	420			18.487.500,00
		18	Barang Bercorak Kebudayaan	73	4	2	67	2.070.000,00
		19	Hewan, Ternak dan Tanaman					

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Jumlah Harga (Rp)
					Baik	Sedang	Rusak	
			Jumlah KIB E	-				20.557.500,00
6	06		Konstruksi dalam Pengerjaan	-				
			Jumlah KIB F	-				
			Jumlah Total					21.819.947.751,00

Sumber : Sekretariat Kecamatan Taman, 2025

c. Administrasi Kewilayahan

Terdapat 19 desa/2 kelurahan di Kecamatan Taman dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.7.
Administrasi Kewilayahan Kecamatan Taman

No	Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT	Jumlah Perangkat Desa	Jumlah Linmas
1	Penggarit	5	5	33	10	34
2	Pener	5	5	29	13	44
3	Jrakah	4	4	42	10	52
4	Gondang	4	4	21	8	38
5	Sokawangi	6	6	44	10	44
6	Kejambon	3	3	10	11	25
7	Jebed Utara	6	12	37	10	62
8	Cibelok	6	6	37	10	68
9	Banjardawa	4	9	36	12	32
10	Banjaran	7	7	34	14	42
11	Pedurungan	7	16	57	12	82
12	Sitemu	4	4	19	12	28
13	Taman	8	17	85	14	86
14	Kaligelang	6	8	38	8	60
15	Wanarejan Selatan	0	8	31	0	60
16	Beji	0	17	56	0	80
17	Kabunan	11	21	67	15	80
18	Asemdoyong	6	12	63	14	56
19	Kedungbanjar	5	5	28	12	44
20	Wanarejan Utara	5	5	37	11	64
21	Jebed Selatan	5	9	25	13	42
Jumlah		**107**	**189**	**829**	**219**	**1123**

Sumber : Sekretariat Kecamatan Taman, 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Taman

Gambaran kinerja pelayanan Kecamatan Taman Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.8.a dan Tabel 2.9 berikut :

Tabel 2.8.a

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks				75,5	77,5	79,5	81,5	83,5	75,5	77,5	85,49	86,60	85,025	100	100	107,53	106,26	101,83
2	Cakupan layanan kecamatan	%				75,22	76,47	77,72	78,98	80,23	75,22	76,47	77,72	87,03	87,03	100	100	100	111,14	109,41
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks				30,61	31,00	31,50	31,97	32,25	30,61	31,00	42,98	Na	Na	100	100	136,44	Na	Na
4	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai				33,78	33,80	33,85	33,90	33,95	33,78	33,80	49,6	59,9	60,25	100	100	146,53	176,70	177,47
5	Persentase Pelayanan Publik yang tersedia	%				85,56	85,56	85,56	85,56	85,56	85,56	85,56	85,56	87,78	87,78	100	100	100	102,59	102,59
6	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%				80	81	82	83	84	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%				10,52	15,79	21,05	26,32	31,58	10,52	47,36	47,36	47,36	47,36	100	299,94	224,99	179,94	149,97

Sumber : Kecamatan Taman, 2025

Semua pelayanan kinerja yang dilakukan oleh Kecamatan Taman dapat mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini didukung adanya komitmen oleh semua pihak dan ketersediaan sarana dan prasarana yang mencukupi.

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Watukumpul khususnya dalam melaksanakan pelayanan, maka kelompok sasaran layanan Kecamatan Watukumpul antara lain sebagai berikut:

a. Pemerintah Desa
b. Masyarakat
c. Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Watukumpul juga menjalin koordinasi dengan *stakeholder* terkait seperti Kepolisian Sektor, Komando Rayon Militer dan Lembaga Masyarakat di tingkat Kecamatan.

Tabel 2.8. b
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Sesuai Bab II RPJMD tahun 2025 – 2029

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	%	100	100	100	100	100
2	Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	%	56,67	63,33	63,33	63,33	63,33
3	Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan	%	80	100	100	100	100
4	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi	%	83,33	83,33	100	100	100
5	Persentase jalan kewenangan kelurahan kondisi baik	%	64	68	72	74	78
6	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	%	100	100	100	100	100
7	Jumlah potensi konflik	kasus	0	0	0	0	0
8	Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik	%	10,52	47,36	47,36	47,36	47,36

Sumber : Kecamatan Taman, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani selama kurun waktu tahun 2020-2024 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada pengaduan masyarakat di kecamatan dapat ditangani dengan baik dan tepat waktu.

Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat selama kurun waktu tahun 2020-2024 adalah 50% - 70%. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya kendala yang terjadi di kecamatan, mulai dari kurang siapnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas serta kurangnya dukungan dari PD terkait.

Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2020 adalah 80% kemudian mengalami kenaikan selama kurun waktu 2021-2024 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepedulian dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang diselenggarakan mulai dari tingkat desa sampai kecamatan sudah sangat tinggi dan perlu untuk terus dipertahankan.

Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi selama kurun waktu tahun 2020-2024 yaitu sebesar 83,33% - 100%. LKD merupakan mitra kecamatan dalam pembangunan kecamatan sehingga perlu untuk difasilitasi kegiatannya.

Persentase jalan kewenanan kelurahan kondisi baik dari tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukan kelurahan sangat baik dalam menangani kerusakan pada jalan.

Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani selama kurun waktu tahun 2020-2024 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada gangguan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan dapat ditangani dengan baik.

Pada tahun 2020 - 2024 tidak terdapat potensi konflik. Artinya tidak ada perbedaan pendapat dan kesalahpahaman yang berlarut larut hingga menjadi suatu potensi konflik. Sebelum menjadi potensi konflik sudah dapat diselesaikan dengan baik lewat koordinasi di tingkat kecamatan.

Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik dalam kurun waktu tahun 2020-2024 capaian tersebut selalu mengalami peningkatan namun masih di bawah rata-rata. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya kendala yang terjadi di kecamatan, mulai dari kurang siapnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas serta kurangnya dukungan dari PD terkait.

Selain indikator pada Renstra Kecamatan Taman Tahun 2020-2024 dan pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 terdapat pula indikator kinerja berdasar SDG's, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 dan Permendagri

https://jdih.pemalangkab.go.id

Nomor 17 Tahun 2021. Namun, untuk Kecamatan Taman tidak terdapat indikator kinerja dari ketiga regulasi tersebut sehingga ditulis NIHIL.

Tabel 2.8. c
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Berdasarkan SDGs

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2	**NIHIL**					
3						

Sumber : Kecamatan Taman, 2025

Tabel 2.8. d
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2	**NIHIL**					
3						

Sumber : Kecamatan Taman, 2025

Tabel 2.8. e
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2	**NIHIL**					
3						

Sumber : Kecamatan Taman, 2025

Tabel 2.9.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang

Uraian	Anggaran Pada Tahun (dalam juta)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (dalam juta)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (dalam juta)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		6.643.035.432	7.016.189.520	6.315.015.700	6.300.249.500		6.257.018.202	6.798.069.901	6.099.994.207	5.836.904.478		94,19	96,89	96,60	92,65	4,72	5,16
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		9.077.140	24.500.100	14.102.880	17.000.000		9.076.380	24.500.100	14.102.880	17.000.000		99,99	100	100	100	190,45	190,47
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		1.475.949.500	268.620.760	674.538.150	470.760.000		976.017.758	266.603.784	674.300.734	465.986.062		66,13	99	99,96	95,60	112,01	103,57
Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		304.628.866	4.000.000	12.200.000	27.300.000		302.139.500	4.000.000	12.199.500	27.299.069		99,18	100	100	100	25,08	25,09
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		63.346.542	38.699.700	28.220.120	245.770.500		59.527.400	38.020.400	28.190.120	245.685.000		93,97	98	99,89	99,97	727,11	73,54
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		55.106.670	26.500.920	12.500.400	18.000.000		55.106.670	26.500.900	12.500.400	18.000.000		100	100	100	100	-7,92	7,92

Sumber : Kecamatan Taman, 2025

Berdasarkan tabel 2.9, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu tahun 2020-2024 rasio antara realisasi dan anggaran Kecamatan Taman, yaitu dengan rata-rata sebesar 90%. Hal ini berarti dana yang sudah dianggarkan dapat terserap secara optimal untuk pelaksanaan pelayanan Kecamatan Taman. Peningkatan anggaran menjadi salah satu pendorong dapat tercapainya target kinerja pelayanan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Taman

Kecamatan Taman dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Taman tahun 2025-2029, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Taman adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Taman adalah sebagai berikut:

1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya Perangkat Daerah dan Pendamping Desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
3. Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Adanya Perangkat Daerah dan Pendamping Desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.3.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Kecamatan Taman diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab, tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan agar dapat di identifikasi berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029 guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah. Permasalahan teridentifikasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Taman

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia	Masih terbatasnya jenis data pemerintahan yang dipublikasi	Masih terbatasnya data pemerintahan yang tersedia
		Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat	Belum tersedianya SOP pelayanan yang sesuai kebutuhan
			Masih kurangnya peran Kecamatan dalam pencapaian SPM
		Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat	Masih terdapat pengajuan izin non usaha
			Masih terdapat ketidaksesuaian data masyarakat miskin
			Masih terdapat pengajuan surat non perizinan
2	Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan	Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Masih rendahnya tingkat partisipasi Musrenbang Desa
			Masih rendahnya tingkat partisipasi Musrenbang Kecamatan
			Belum optimalnya pendampingan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten
		Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Masih rendahnya tingkat partisipasi Musrenbang Kelurahan
			Masih rendahnya sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik
			Masih rendahnya kapasitas pengelola lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan
			Masih terdapat ketidaksesuaian data masyarakat miskin
			Belum optimalnya pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan
		Belum optimalnya peran serta lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Masih rendahnya sarana prasarana yang dimiliki lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan
			Masih rendahnya kapasitas pengelola lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan
3	Belum optimalnya penanganan	Masih rendahnya linmas yang mempunyai	Belum optimalnya koordinasi dengan Polsek dan Koramil

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	kompetensi	Masih terbatasnya Linmas yang mengikuti pelatihan
		Belum optimalnya koordinasi penegakkan Perda/Perbup	Belum optimalnya koordinasi monitoring penegakkan Perda/Perbup
4	Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	Masih banyak masyarakat yang belum paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Belum optimalnya peringatan hari besar nasional dan hari besar agama sebagai upaya menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
			Masih minimnya pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
			Belum optimalnya penanganan potensi konflik sosial
			Perlu ditingkatkannya koordinasi antar pimpinan di Kecamatan
5	Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Masih banyak desa yang belum mampu menyusun Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
			Masih banyak desa yang belum mampu melaksanakan administrasi tata pemerintahan desa dengan tertib
			Masih banyak desa yang belum mampu mengelola keuangan desa dan mendayagunakan aset desa
			Belum optimalnya pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa
			Ada desa yang mengadakan pemilihan kepala desa
			Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
			Ada desa yang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
			Belum optimalnya fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
			Belum optimalnya fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
			Belum optimalnya fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.3.2 Isu Strategis

Kecamatan Taman dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik dilingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Taman tahun 2025-2029, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Taman adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan;
4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa dan kecamatan;
5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan;
6. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran;
7. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Taman adalah sebagai berikut:

1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya PD dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa;
3. Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan;
4. Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa dan kecamatan;
5. Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa;
6. Adanya pendampingan dari PD terkait;

https://jdih.pemalangkab.go.id

7. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Kecamatan Taman, telaah visi misi dan program prioritas Bupati, dan telaah Renstra Kemendagri/Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang yang meliputi potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi pada periode sebelumnya, dirumuskan isu strategis Kecamatan Taman yaitu **"Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat, kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat"**.

Tabel 2.11
Isu Strategis Kecamatan Taman

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pelayanan Publik	Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia		Krisis Lapangan Pekerjaan	Masih tingginya kesenjangan pembangunan antar wilayah karena persebaran pusat ekonomi yang tidak merata antara utara dan selatan, barat dan timur (Bali), serta daerah kepulauan	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Belum Optimalnya Pelayanan Publik di Kecamatan Pemalang
Pembinaan dan Pengawasan tata kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan	Belum optimalnya desa bertata kelola pemerintahan baik		Krisis Utang	Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya mismatch antara dunia	Penurunan tingkat kemiskinan	Belum Optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Tata Kelola Pemerinta

https://jdih.pemalangkab.go.id

				pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri		han Desa/Kelurahan
	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja		Hilangnya Keanekaragaman Hayati	Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan jumlah penduduk miskin serta scarring effect akibat pandemi COVID-19	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	
	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi					

Setelah mempertimbangkan berbagai isu strategis global, Nasional, dan Provinsi Jawa Tengah, dan memperhatikan potensi, peluang dan tantangan yang ada di Kecamatan Taman, dirumuskan isu strategis Kecamatan Taman. Isu strategis Kecamatan Taman tahun 2025-2029 difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat, kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai berikut:

a. Pemerataan pembangunan infrastruktur
b. Sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkarakter
c. Reformasi tata kelola pemerintahan

2.4 Telaahan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Penelaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Taman yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah :

"PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA"

Visi ini memiliki pembentuk kata :

1. **Bersih** Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan
2. **Cakap** dimaknai memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
3. **Handal** dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.
4. **Mulya** Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. **Misi 1 Resik**: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih.
   Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik
2. **Misi 2 Hijau:** meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sector unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau, yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan) yang ramah lingkungan, industri

https://jdih.pemalangkab.go.id

hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM dimasyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.

3. **Misi 3 Apik**: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penaatan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dari Desa.
4. **Misi 4 Peduli**: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi ewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal;
5. **Misi 5 Silaturahmi**: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, dan saling menghormati dan teposliro
6. **Misi 6 Organisatoris**: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan *Good Governance*, *Clean Governance* dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.
7. **Misi 7 Digitalisasi**: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi
8. **Misi 8 Ikhlas**: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkan kearifan dan budaya lokal.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Taman

Kecamatan Taman dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang pelayanan publik, maka Kecamatan Taman harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Kecamatan Taman secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat secara umum.

3.1.1 Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Taman selama tahun 2025–2029 adalah "**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan**". Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Taman sebagai perangkat daerah yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, bertujuan untuk **meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan** yaitu menciptakan wilayah kecamatan yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing, dengan mengurangi kemiskinan,kesenjangan pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tujuan tersebut diukur dengan indikator jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan.

3.1.2 Sasaran

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Taman dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Taman selama tahun 2025-2029, adalah "**Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat**". Sasaran tersebut diukur dengan indikator nilai SKM dan Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri yang diperoleh dari jumlah desa mandiri dibagi jumlah seluruh desa di kecamatan dikali 100%.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Taman dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Taman

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -						Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan		Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan	Angka	4	4	4	5	5	6	6	6
2		Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Nilai SKM	Nilai	85,025	86,60	86,65	86,70	86,75	86,80	86,85	86,90
			Prosentase peningkatan status Desa maju menjadi Desa mandiri	%	19,05	19,05	19,05	23,81	23,81	28,57	28,57	28,57

https://jdih.pemalangkab.go.id

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Kecamatan Taman guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.2.1. Strategi

Strategi yang dilakukan Kecamatan Pemalang untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM Kecamatan Pemalang

   Meningkatkan kualitas SDM Kecamatan Pemalang dengan cara sebagai berikut :

   a. Mengusulkan pegawai Kecamatan Pemalang ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang untuk mengikuti pelatihan, bimbingan teknis maupun sosialisasi yang dapat meningkatkan kompetensi pegawai Kecamatan Pemalang
   b. Mengadakan Pelatihan/Sosialisasi/ Bimbingan Teknis intern di Kecamatan Pemalang kepada Pegawai Kecamatan Pemalang
   c. Mengadakan pelatihan digitalisasi dalam pemberian layanan pemerintahan
2. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas
3. Meningkatnya kualitas pembangunan desa dan kawasan perdesaan
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hidup berdampingan secara harmonis dan kondusif
5. Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntable, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik

3.2.2.Arah Kebijakan

Penahapan pembangunan Kecamatan Pemalang adalah prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Taman, Penahapan Renstra Kecamatan Taman dapat disajikan pada tabel di bawah ini

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Kecamatan Taman

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Memperkuat digitalisasi dalam memberikan pelayanan pemerintahan	Meningkatkan infrastruktur di Desa / Kelurahan (peningkatan infrastruktur jalan dan selokan)	Penguatan Pemberdayaan Masyarakat melalui pelatihan ketrampilan untuk mendukung UMKM	Mempercepat pembangunan Kecamatan Pemalang untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat	Peningkatan Keamanan dan ketertiban umum

https://jdih.pemalangkab.go.id

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategis yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025 – 2030 memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Taman adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Taman

NO	OPERASIONALISASI NPSK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN PEMALANG	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum	Peningkatan kualitas perencanaan daerah di fokuskan pada transparansi, akuntabilitas perencanaan, dan sinergitas dok pusat dan propinsi Peningkatan kualitas digitalisai pelayanan pemerintahan di fokuskan pada peningkatan tata kelola arsitektur SPBE, mendorong kualitas SMART City dan kualitas layanan aduan Peningkatan kualitas pelayanan publik di fokuskan pada pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan kepuasan pada masyarakat	Penguatan sistem perencanaan, pelayananan pemrintahan dan pengukuran kinerja	
2	Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Pengembangan industri kecil menengah dengan penguatan sentra/kluster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital	Pengembangan pelatihan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan UMKM	
3	Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan konduktivitas wilayah dengan peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama dan pemahaman wawasan kebangsaan	Meningkatkan pelatihan limas dan pembinaan masyarakat terkait dengan sistem pengaduan maupun keamanan dan ketertiban	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	OPERASIONALISASI NPSK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN PEMALANG	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa di fokuskan pada peningkatan kualitas eprocurements, kualitas sarana dan prasarana	Penguatan koordinasi dan supervisi dar	
5	Membina dan Mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan / atau kelurahan	Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan difokuskan pada peningktan indeks desa, peningkatan peran BUMDes dalam pembangunan daerah, peningkatan pembinaan dan pengawasan kecamatan dalam pembangunan desa/kelurahan dan pengembangan kerjasama antar dan pengembangan kerjasama antar desa	Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/kelurahan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Taman

4.1.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Taman

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Taman yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029 :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang
   1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
   3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
      b. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
   4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
      b. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
      c. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
      d. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
      e. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

https://jdih.pemalangkab.go.id

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   h. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
   c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   e. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   f. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

https://jdih.pemalangkab.go.id

a. Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
b. Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
   a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
   c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
   b. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
   c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
   a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
   b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
   c. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
   d. Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan
3. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
   a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
   b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
   a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id

a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
b. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
c. Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

F. Program Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintahan Desa

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
   b. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
   c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
   d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
   e. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
   f. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
   g. Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
   h. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
   i. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
   j. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pemalang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanan Kecamatan Pemalang. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Kecamatan Pemalang serta teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pemalang seperti Tabel berikut :

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pemalang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAB	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntable, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di Wilayah Kecamatan				Jumlah desa/kelurahan mandiri di kecamatan (Desa/Kelurahan)		
		Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat			Nilai SKM (Nilai)		
					Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri (%)		
			Meningkatnya kinerja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAB	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan (%)	**evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (Dokumen)**		
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel (%)	**Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan yang tersusun (Dokumen)**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Persentase dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang akuntabel (%)	**Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang tersusun (Dokumen)**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	
						Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	
				Persentase administrasi kepegawaian yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	**Jumlah aktifitas administrasi kepegawaian yang terlaksana (Aktifitas)**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAB	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
						Atribut Kelengkapannya	
						Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	
				Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	**Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersedia (Paket, Dokumen, Dan Laporan)**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	**Jumlah barang milik daerah yang tersedia (Unit)**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Persentase ketersediaan laporan penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	**Jumlah laporan penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia (Laporan)**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAB	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	**Jumlah barang milik daerah yang terpelihara (Unit)**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan Mebel	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	
				Persentase dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di	**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAB	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				tingkat kecamatan yang menunjang pelaksanaan tugas (%)	**tingkat kecamatan yang tersusun (Dokumen)**		
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Persentase Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang menunjang pelaksanaan tugas (%)	**Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan yang tersusun (Laporan)**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	
						Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
						Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di Wilayah Kecamatan	
						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Persentase Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang menunjang pelaksanaan tugas (%)	**Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat (Laporan)**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang tersedia	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	
					Persentase sarana		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAB	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
					prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)		
				Persentase jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang menunjang pelaksanaan tugas (%)	**Jumlah laporan koordinasi kegiatan Pemberdayaan desa yang tersusun (Laporan)**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	
						Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	
						Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan (%)	**Jumlah kegiatan pemberdayaan di kelurahan (Kegiatan)**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
						Evaluasi Kelurahan	
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan (%)	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi (Lembaga Kemasyarakatan)**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	
						Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
						Peningkatan Kapasitas Lembaga	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAB	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
						Kemasyarakatan	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum		**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	
				Persentase laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang menunjang pelaksanaan tugas (%)	**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun (Laporan)**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	
						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
						Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
				Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang menunjang pelaksanaan tugas (%)	**Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tersusun (Laporan)**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	
						Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama		**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	
				persentase Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAB	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				daerah yang menunjang pelaksanaan tugas (%)	**(Dokumen)**		
						Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
						Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional	
						Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa		**Persentase kesesuaian RKPDes dan RPJMDes dengan RPJMD (%)**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	
				Persentase Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang menunjang pelaksanaan tugas (%)	**Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun (Dokumen)**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	
						Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
						Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAB	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
						Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
						Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
						Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
						Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
						Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
						Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
						Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Persentase Dokumen Penataan Organisasi yang Menunjang Pelaksanaan Tugas (%)	**Jumlah Dokumen Penataan Organisasi yang Tersusun (Dokumen)**	**Penataan Organisasi**	
						Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.1.2 Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 dan Kerangka Pendanaan

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Kecamatan Taman selama tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Taman
Kabupaten Pemalang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondidi Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
KECAMATAN TAMAN																						
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Jumlah desa/kelurahan mandiri di kecamatan (Desa/Keluraha n)**						**4**		**5**		**5**		**6**		**6**		**6**		**6**			**Kec.Taman**
Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	**Nilai SKM (Nilai)**						**85,025**		**86,60**		**86,65**		**86,70**		**86,75**		**86,80**		**86,85**			**Kec.Taman**

https://jdih.pemalangkab.go.id

	Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri (%)		**KECAMATAN**				**19,05**		**19,05**		**23,81**		**23,81**		**28,57**		**28,57**		**28,57**			**Kec.Taman**
			KECAMATAN TAMAN					**6.171.936.060**		**6.171.936.060**		**6.171.936.060**		**6.171.936.060**		**6.171.936.060**		**6.171.936.060**		**6.171.936.060**	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.01	**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**5.835.028.000**		**5.835.028.000**		**5.835.028.000**		**5.835.028.000**		**5.835.028.000**		**5.835.028.000**		**5.835.028.000**	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					**42.000.000**		**42.000.000**		**42.000.000**		**42.000.000**		**42.000.000**		**42.000.000**		**42.000.000**	Kec.Taman	Kec.Taman
			Keluaran Kegiatan	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun**	**Dokumen**	**9**	**9**		**9**		**9**		**9**		**9**		**9**		**9**			Kec.Taman	Kec.Taman
			Hasil Kegiatan	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**			Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	dokumen	2	2	6.000.000	**2**	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	dokumen	2	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	Kec.Taman	Kec.Taman

https://jdih.pemalangkab.go.id

		7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	dokumen	1	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang disusun	dokumen	1	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang disusun	dokumen	1	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	dokumen	4	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	dokumen	4	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.01.2.03	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**3**	**3**	**5.012.000.000**		**5.012.000.000**		**5.012.000.000**		**5.012.000.000**		**5.012.000.000**		**5.012.000.000**		**5.012.000.000**	Kec.Taman	Kec.Taman
			Keluaran Kegiatan	**Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun**	**Dokumen**	**4**	**4**		**4**		**4**		**4**		**4**		**4**		**4**		Kec.Taman	Kec.Taman
			Hasil Kegiatan	**Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		Kec.Taman	Kec.Taman

https://jdih.pemalangkab.go.id

		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang tersedia gaji dan tunjangan	orang/bulan	30	30	5.000.000.000	30	5.000.000.000	30	5.000.000.000	30	5.000.000.000	30	5.000.000.000	30	5.000.000.000	30	5.000.000.000	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	dokumen	2	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD	laporan	4	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**205.000.000**		**205.000.000**		**205.000.000**		**205.000.000**		**205.000.000**		**205.000.000**		**205.000.000**	Kec.Taman	Kec.Taman
			Keluaran Kegiatan	**Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun**	**Dokumen**	**7**	**7**		**7**		**7**		**7**		**7**		**7**		**7**		Kec.Taman	Kec.Taman
			Hasil Kegiatan	**Persentase dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	Kec.Taman	Kec.Taman

https://jdih.pemalangkab.go.id

		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang disediakan	Paket	12	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jenis surat kabar yang disediakan	Dokumen	12	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Laporan	12	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jenis Arsip Dinamis pada SKPD yang tertata	Dokumen	12	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.01.2.0007	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**	Kec.Taman	Kec.Taman
			Keluaran Kegiatan	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia**	**Unit**	**4**	**4**		**4**		**4**		**4**		**4**		**4**		**4**		Kec.Taman	Kec.Taman
			Hasil Kegiatan	**Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	**4**	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	Kec.Taman	Kec.Taman

https://jdih.pemalangkab.go.id

		7.01.01.2.0008	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**326.028.000**		**326.028.000**		**326.028.000**		**326.028.000**		**326.028.000**		**326.028.000**		**326.028.000**	Kec.Taman	Kec.Taman
			Keluaran Kegiatan	**Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun**	**Dokumen**	**3**	**3**		**3**		**3**		**3**		**3**		**3**		**3**		Kec.Taman	Kec.Taman
			Hasil Kegiatan	**Persentase dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	60.840.000	12	60.840.000	12	60.840.000	12	60.840.000	12	60.840.000	12	60.840.000	12	60.840.000	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	250.188.000	12	250.188.000	12	250.188.000	12	250.188.000	12	250.188.000	12	250.188.000	12	250.188.000	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**200.000.000**		**200.000.000**		**200.000.000**		**200.000.000**		**200.000.000**		**200.000.000**		**200.000.000**	Kec.Taman	Kec.Taman

https://jdih.pemalangkab.go.id

			Keluaran Kegiatan	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara**	**Unit**	**31**	**31**		**31**		**31**		**31**		**31**		**31**		**31**		Kec.Taman	Kec.Taman
			Hasil Kegiatan	**Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	14	14	15.000.000	14	15.000.000	14	15.000.000	14	15.000.000	14	15.000.000	14	15.000.000	14	15.000.000	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainyya	Jumlah gedung kantor dan bangunan yang Dipelihara	Unit	2	2	170.000.000	2	170.000.000	2	170.000.000	2	170.000.000	2	170.000.000	2	170.000.000	2	170.000.000	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**36.023.400**		**36.023.400**		**36.023.400**		**36.023.400**		**36.023.400**		**36.023.400**		**36.023.400**	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**					**12.023.400**		**12.023.400**		**12.023.400**		**12.023.400**		**12.023.400**		**12.023.400**		**12.023.400**	Kec.Taman	Kec.Taman

https://jdih.pemalangkab.go.id

			Keluaran Kegiatan	**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun**	**Dokumen**	**2**	**2**		**2**		**2**		**2**		**2**		**2**		**2**		Kec.Taman	Kec.Taman
			Hasil Kegiatan	**Persentase dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.02.2.01.02	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerinah dan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerinah dan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	laporan	4	4	7.000.000	4	7.000.000	4	7.000.000	4	7.000.000	4	7.000.000	4	7.000.000	4	7.000.000	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	4	4	5.023.400	4	5.023.400	4	5.023.400	4	5.023.400	4	5.023.400	4	5.023.400	4	5.023.400	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**					**14.000.000**		**14.000.000**		**14.000.000**		**14.000.000**		**14.000.000**		**14.000.000**		**14.000.000**	Kec.Taman	Kec.Taman
			Keluaran Kegiatan	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja**	**Dokumen**	**3**	**3**		**3**		**3**		**3**		**3**		**3**		**3**		Kec.Taman	Kec.Taman

https://jdih.pemalangkab.go.id

				perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun																		
			Hasil Kegiatan	**Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**			Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	12	12	3.000.000	12	4.500.000	12	4.500.000	12	4.500.000	12	4.500.000	12	4.500.000	12	4.500.000	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4	4.000.00	4	4.500.00	4	4.500.00	4	4.500.00	4	4.500.00	4	4.500.00	4	4.500.00	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**					**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**	Kec.Taman	Kec.Taman
			Keluaran Kegiatan	**Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang**	**Dokumen**	**24**	**24**		**24**		**24**		**24**		**24**		**24**		**24**		Kec.Taman	Kec.Taman

https://jdih.pemalangkab.go.id

				dilimpahkan kepada Camat yang tersusun																		
			Hasil Kegiatan	**Persentase dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang tersusun**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	12	12	5.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	12	12	5.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**220.732.660**		**220.732.660**		**220.732.660**		**220.732.660**		**220.732.660**		**220.732.660**		**220.732.660**	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**					**150.000.000**		**150.000.000**		**150.000.000**		**150.000.000**		**150.000.000**		**150.000.000**		**150.000.000**	Kec.Taman	Kec.Taman
			Keluaran Kegiatan	**Jumlah dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun**	**Dokumen**	**3**	**3**		**3**		**3**		**3**		**3**		**3**		**3**		**3**		Kec.Taman	Kec.Taman
			Hasil Kegiatan	**Persentase dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	Lembaga kemasyarak	19	19	40.000.000	19	40.000.000	19	40.000.000	19	40.000.000	19	40.000.000	19	40.000.000	19	40.000.000	Kec.Taman	Kec.Taman

https://jdih.pemalangkab.go.id

			Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	atan																
		7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	1	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**					**70.732.660**		**70.732.660**		**70.732.660**		**70.732.660**		**70.732.660**		**70.732.660**		**70.732.660**	Kec.Taman	Kec.Taman
			Keluaran Kegiatan	**Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang aktif**	**Lembaga kemasyarakatan**	**1**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		Kec.Taman	Kec.Taman
			Hasil Kegiatan	**Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang aktif**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**			
		7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga kemasyarakatan	1	1	70.732.660	1	70.732.660	1	70.732.660	1	70.732.660	1	70.732.660	1	70.732.660	1	70.732.660	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.04.2.01	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**7.000.000**		**7.000.000**		**7.000.000**		**7.000.000**		**7.000.000**		**7.000.000**		**7.000.000**	Kec.Taman	Kec.Taman

https://jdih.pemalangkab.go.id

		7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**					**3.500.000**		**3.500.000**		**3.500.000**		**3.500.000**		**3.500.000**		**3.500.000**		**3.500.000**	Kec.Taman	Kec.Taman
			Keluaran Kegiatan	**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun**	**Laporan**	**12**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		Kec.Taman	Kec.Taman
			Hasil Kegiatan	**Persentase laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**					**3.500.000**		**3.500.000**		**3.500.000**		**3.500.000**		**3.500.000**		**3.500.000**		**3.500.000**	Kec.Taman	Kec.Taman
			Keluaran Kegiatan	**Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan**	**Laporan**	**4**	**4**		**4**		**4**		**4**		**4**		**4**		**4**		Kec.Taman	Kec.Taman

https://jdih.pemalangkab.go.id

				peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tersusun																		
			Hasil Kegiatan	**Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tersusun**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia	lap	4	4	3.500.000	4	3.500.000	4	3.500.000	4	3.500.000	4	3.500.000	4	3.500.000	4	3.500.000	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**52.640.400**		**52.640.400**		**52.640.400**		**52.640.400**		**52.640.400**		**52.640.400**		**52.640.400**		
		7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**					**52.640.400**		**52.640.400**		**52.640.400**		**52.640.400**		**52.640.400**		**52.640.400**		**52.640.400**	Kec.Taman	Kec.Taman
			Keluaran Kegiatan	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun**	**Dokumen**	**13**	**13**		**13**		**13**		**13**		**13**		**13**		**13**		**13**		Kec.Taman	Kec.Taman
			Hasil Kegiatan	**Persentase dokumen**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		Kec.Taman	Kec.Taman

https://jdih.pemalangkab.go.id

				penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun																		
		7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	100	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12	12	12.640.400	12	12.640.400	12	12.640.400	12	12.640.400	12	12.640.400	12	12.640.400	12	12.640.400	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**17.511.600**		**17.511.600**		**17.511.600**		**17.511.600**		**17.511.600**		**17.511.600**		**17.511.600**	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**					**17.511.600**		**17.511.600**		**17.511.600**		**17.511.600**		**17.511.600**		**17.511.600**		**17.511.600**	Kec.Taman	Kec.Taman

https://jdih.pemalangkab.go.id

			Pemerintahan Desa																			
			Keluaran Kegiatan	**Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun**	**Dokumen**																Kec.Taman	Kec.Taman
			Hasil Kegiatan	**Persentase dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun**	**%**																Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	19	19	2.000.400	19	2.000.400	19	2.000.400	19	2.000.400	19	2.000.400	19	2.000.400	19	2.000.400	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	21	21	2.010.000	21	2.010.000	21	2.010.000	21	2.010.000	21	2.010.000	21	2.010.000	21	2.010.000	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	19	19	2.500.000	19	2.500.000	19	2.500.000	19	2.500.000	19	2.500.000	19	2.500.000	19	2.500.000	Kec.Taman	Kec.Taman

https://jdih.pemalangkab.go.id

		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	16	16	2.000.000	16	2.000.000	16	2.000.000	16	2.000.000	16	2.000.000	16	2.000.000	16	2.000.000	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	19	19	2.000.200	19	2.000.200	19	2.000.200	19	2.000.200	19	2.000.200	19	2.000.200	19	2.000.200	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	4	4	3.000.400	4	3.000.400	4	3.000.400	4	3.000.400	4	3.000.400	4	3.000.400	4	3.000.400	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	4	4	2.000.400	4	2.000.400	4	2.000.400	4	2.000.400	4	2.000.400	4	2.000.400	4	2.000.400	Kec.Taman	Kec.Taman
		7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	19	19	2.000.200	19	2.000.200	19	2.000.200	19	2.000.200	19	2.000.200	19	2.000.200	19	2.000.200	Kec.Taman	Kec.Taman
KELURAHAN WANAREJAN SELATAN																					
		7.01.01.2.06	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah					**26.000.000**		**26.000.000**		**26.000.000**		**26.000.000**		**26.000.000**		**26.000.000**		**26.000.000**	Kelurahan Wansel	Kelurahan Wansel

https://jdih.pemalangkab.go.id

			Keluaran Kegiatan	**Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun**	**Dokumen**	**5**	**5**		**5**		**5**		**5**		**5**		**5**		**5**		Kelurahan Wansel	Kelurahan Wansel
		7.01.01.2.06.02	**Hasil Kegiatan**	**Persentase dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		Kelurahan Wansel	Kelurahan Wansel
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	Kelurahan Wansel	Kelurahan Wansel
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	Kelurahan Wansel	Kelurahan Wansel
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang disediakan	Paket	12	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	Kelurahan Wansel	Kelurahan Wansel
		7.01.01.2.06.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jenis surat kabar yang disediakan	Dokumen	12	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	Kelurahan Wansel	Kelurahan Wansel
		7.01.01.2.0007	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Laporan	12	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	Kelurahan Wansel	Kelurahan Wansel
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**	Kelurahan Wansel	Kelurahan Wansel
			Keluaran Kegiatan	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia**	**Unit**	**2**	**2**		**2**		**2**		**2**		**2**		**2**		**2**		Kelurahan Wansel	Kelurahan Wansel

https://jdih.pemalangkab.go.id

		7.01.01.2.07.0006	**Hasil Kegiatan**	**Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		Keluraha n Wansel	Kelura han Wansel
		7.01.01.2.0008	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	Keluraha n Wansel	Kelura han Wansel
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**205.974.000**		**205.974.000**		**205.974.000**		**205.974.000**		**205.974.000**		**205.974.000**		**205.974.000**	Keluraha n Wansel	Kelura han Wansel
			Keluaran Kegiatan	**Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun**	**Dokumen**	**2**	**2**		**2**		**2**		**2**		**2**		**2**		**2**		Keluraha n Wansel	Kelura han Wansel
		7.01.01.2.08.0002	**Hasil Kegiatan**	**Persentase dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		Keluraha n Wansel	Kelura han Wansel
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	17.340.000	12	17.340.000	12	17.340.000	12	17.340.000	12	17.340.000	12	17.340.000	12	17.340.000	Keluraha n Wansel	Kelura han Wansel
		7.01.01.2.09	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	188.634.000	12	188.634.000	12	188.634.000	12	188.634.000	12	188.634.000	12	188.634.000	12	188.634.000	Keluraha n Wansel	Kelura han Wansel

https://jdih.pemalangkab.go.id

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**8.000.000**		**8.000.000**		**8.000.000**		**8.000.000**		**8.000.000**		**8.000.000**		**8.000.000**	Kelurahan Wansel	Kelurahan Wansel
			Keluaran Kegiatan	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara**	**Unit**	**11**	**11**		**11**		**11**		**11**		**11**		**11**		**11**		**11**		Kelurahan Wansel	Kelurahan Wansel
		7.01.01.2.09.0002	**Hasil Kegiatan**	**Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		Kelurahan Wansel	Kelurahan Wansel
		7.01.01.2.09.0006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	5	3.000.000	5	3.000.000	5	3.000.000	5	3.000.000	5	3.000.000	5	3.000.000	5	3.000.000	Kelurahan Wansel	Kelurahan Wansel
		7.01.02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	Kelurahan Wansel	Kelurahan Wansel
		7.01.02.2.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**3.000.000**		**3.000.000**		**3.000.000**		**3.000.000**		**3.000.000**		**3.000.000**		**3.000.000**	Kelurahan Wansel	Kelurahan Wansel
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di					**3.000.000**		**3.000.000**		**3.000.000**		**3.000.000**		**3.000.000**		**3.000.000**		**3.000.000**	Kelurahan Wansel	Kelurahan Wansel

https://jdih.pemalangkab.go.id

			Kecamatan																		
			Keluaran Kegiatan	**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun**	**Dokumen**	**4**	**4**		**4**		**4**		**4**		**4**		**4**		**4**		Kelurahan Wansel	Kelurahan Wansel
		7.01.02.2.02.0003	**Hasil Kegiatan**	**Persentase dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		Kelurahan Wansel	Kelurahan Wansel
		7.01.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	Kelurahan Wansel	Kelurahan Wansel
		7.01.03.2.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**250.000.000**		**250.000.000**		**250.000.000**		**250.000.000**		**250.000.000**		**250.000.000**		**250.000.000**	Kelurahan Wansel	Kelurahan Wansel
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					**250.000.000**		**250.000.000**		**250.000.000**		**250.000.000**		**250.000.000**		**250.000.000**		**250.000.000**	Kelurahan Wansel	Kelurahan Wansel
			Keluaran Kegiatan	**Jumlah dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun**	**Dokumen**	**3**	**3**		**3**		**3**		**3**		**3**		**3**		**3**		Kelurahan Wansel	Kelurahan Wansel
		7.01.03.2.01.01	**Hasil Kegiatan**	**Persentase dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaa**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		Kelurahan Wansel	Kelurahan Wansel

https://jdih.pemalangkab.go.id

				n desa yang tersusun																	
		7.01.03.2.02.02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga kemasyarakatan	3	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	Keluraha n Wansel	Kelura han Wansel
		7.01.03.2.02.03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Saran dan Prasarana yang terbangun	Unit	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Keluraha n Wansel	Kelura han Wansel
		7.01.04.2.01	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakatdi kelurahan	Pokmas/Ormas	3	3	145.000.000	3	145.000.000	3	145.000.000	3	145.000.000	3	145.000.000	3	145.000.000	3	145.000.000	Keluraha n Wansel	Kelura han Wansel
		7.01.04.2.01	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**4.701.560**		**4.701.560**		**4.701.560**		**4.701.560**		**4.701.560**		**4.701.560**		**4.701.560**	Keluraha n Wansel	Kelura han Wansel
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		Keluraha n Wansel	Kelura han Wansel
			Keluaran Kegiatan	**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun**	**Laporan**	**12**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		**12**	Keluraha n Wansel	Kelura han Wansel
		7.01.04.2.01.0001	**Hasil Kegiatan**	**Persentase laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		Keluraha n Wansel	Kelura han Wansel

https://jdih.pemalangkab.go.id

				ketertiban umum yang tersusun																		
		7.01.05	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	4.701.560	12	4.701.560	12	4.701.560	12	4.701.560	12	4.701.560	12	4.701.560	12	4.701.560	Kelurahan Wansel	Kelurahan Wansel
		7.01.05.2.01	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**																		Kelurahan Wansel	Kelurahan Wansel
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**	Kelurahan Wansel	Kelurahan Wansel
			Keluaran Kegiatan	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun**	**Dokumen**			**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**	Kelurahan Wansel	Kelurahan Wansel
		7.01.05.2.01.0001	**Hasil Kegiatan**	**Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun**	**%**																Kelurahan Wansel	Kelurahan Wansel
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti	Orang	100	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	Kelurahan Wansel	Kelurahan Wansel

https://jdih.pemalangkab.go.id

			dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
KELURAHAN BEJI																						
		7.01.01.2.06	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA																			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah					**42.000.000**		**42.000.000**		**42.000.000**		**42.000.000**		**42.000.000**		**42.000.000**		**42.000.000**	Kelurahan Beji	Kelurahan Beji
			Keluaran Kegiatan	**Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun**	**Dokumen**	**5**	**5**		**5**		**5**		**5**		**5**		**5**		**5**		Kelurahan Beji	Kelurahan Beji
		7.01.01.2.06.01	**Hasil Kegiatan**	**Persentase dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		Kelurahan Beji	Kelurahan Beji

https://jdih.pemalangkab.go.id

		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	5	5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	Keluraha n Beji	Kelura han Beji
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	Keluraha n Beji	Kelura han Beji
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang disediakan	Paket	12	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	Keluraha n Beji	Kelura han Beji
		7.01.01.2.06.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jenis surat kabar yang disediakan	Dokumen	12	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	Keluraha n Beji	Kelura han Beji
		7.01.01.2.07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Laporan	12	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	Keluraha n Beji	Kelura han Beji
			Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah					**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**	Keluraha n Beji	Kelura han Beji
			Keluaran Kegiatan	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia**	**Unit**	**2**	**2**		**2**		**2**		**2**		**2**		**2**		**2**		Keluraha n Beji	Kelura han Beji
		7.01.01.2.07.06	**Hasil Kegiatan**	**Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		Keluraha n Beji	Kelura han Beji
		7.01.01.2.0008	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	unit	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	Keluraha n Beji	Kelura han Beji

https://jdih.pemalangkab.go.id

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					196.204.000		196.204.000		196.204.000		196.204.000		196.204.000		196.204.000		196.204.000	Kelurahan Beji	Kelurahan Beji
			Keluaran Kegiatan	**Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun**	**Dokumen**	**3**	**3**		**3**		**3**		**3**		**3**		**3**		**3**		Kelurahan Beji	Kelurahan Beji
		7.01.01.2.08.0001	**Hasil Kegiatan**	**Persentase dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		Kelurahan Beji	Kelurahan Beji
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	Kelurahan Beji	Kelurahan Beji
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	19.710.000	12	19.710.000	12	19.710.000	12	19.710.000	12	19.710.000	12	19.710.000	12	19.710.000	Kelurahan Beji	Kelurahan Beji
		7.01.01.2.09	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	172.494.000	12	172.494.000	12	172.494.000	12	172.494.000	12	172.494.000	12	172.494.000	12	172.494.000	Kelurahan Beji	Kelurahan Beji
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Kelurahan Beji	Kelurahan Beji

https://jdih.pemalangkab.go.id

			Keluaran Kegiatan	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara**	**Unit**	**12**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		Kelurahan Beji	Kelurahan Beji
		7.01.01.2.09.0002	**Hasil Kegiatan**	**Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		Kelurahan Beji	Kelurahan Beji
		7.01.01.2.09.0006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000	Kelurahan Beji	Kelurahan Beji
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	6	2.000.000	6	2.000.000	6	2.000.000	6	2.000.000	6	2.000.000	6	2.000.000	6	2.000.000	Kelurahan Beji	Kelurahan Beji
		7.01.03	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		1	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	Kelurahan Beji	Kelurahan Beji
		7.01.03.2.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**250.000.000**		**250.000.000**		**250.000.000**		**250.000.000**		**250.000.000**		**250.000.000**		**250.000.000**	Kelurahan Beji	Kelurahan Beji
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					**250.000.000**		**250.000.000**		**250.000.000**		**250.000.000**		**250.000.000**		**250.000.000**		**250.000.000**	Kelurahan Beji	Kelurahan Beji
			Keluaran Kegiatan	**Jumlah dokumen koordinasi kegiatan**	**Dokumen**	**3**	**3**		**3**		**3**		**3**		**3**		**3**		**3**		Kelurahan Beji	Kelurahan Beji

https://jdih.pemalangkab.go.id

				pemberdayaan kelurahan yang tersusun																		
		7.01.03.2.01.01	**Hasil Kegiatan**	**Persentase dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		Kelurahan Beji	Kelurahan Beji
		7.01.03.2.02.02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga kemasyarakatan	4	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	Kelurahan Beji	Kelurahan Beji
		7.01.03.2.02.03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Saran dan Prasarana yang terbangun	Unit	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	Kelurahan Beji	Kelurahan Beji
		7.01.05	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Pokmas/Ormas	3	3	145.000.000	3	145.000.000	3	145.000.000	3	145.000.000	3	145.000.000	3	145.000.000	3	145.000.000	Kelurahan Beji	Kelurahan Beji
		7.01.05.2.01	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**	Kelurahan Beji	Kelurahan Beji
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**	Kelurahan Beji	Kelurahan Beji
			Keluaran Kegiatan	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**Dokumen**	**1**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		Kelurahan Beji	Kelurahan Beji

https://jdih.pemalangkab.go.id

				sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun																	
		7.01.05.2.01.0001	**Hasil Kegiatan**	**Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		Kelurahan Beji	Kelurahan Beji
		7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	100	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	Kelurahan Beji	Kelurahan Beji

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kecamatan Taman sudah menerapkan penganggaran berbasis pengarusutamaan gender, pada kegiatan Musrenbang Kecamatan, dimana perwakilan kelompok perempuan menjadi salah satu komponen peserta. Pengarusutamaan gender diterapkan juga dalam fasilitasi lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yaitu fasilitasi kepada PKK dan Posyandu.

Selain menentukan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan, langkah selanjutnya yaitu menentukan target pencapaian indikator kinerja terkait SDGs, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang secara berturut – turut disajikan pada tabel di bawah ini. Namun karena Kecamatan Taman tidak memiliki keempat indikator tersebut, maka disampaikan Nihil sesuai tabel di bawah.

Tabel 4.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Berdasarkan SDGs

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2	**NIHIL**							
3								
dst								

Tabel 4.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2	**NIHIL**							
3								
dst								

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2	**NIHIL**							
3								
dst								

Tabel 4.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2	**NIHIL**							
3								
dst								

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable)* mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Kecamatan Taman yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Taman yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Taman Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Taman	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2024	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan	Angka	4	4	4	5	5	6	6	6
2	Nilai SKM	Indeks	85,025	86,60	86,65	86,70	86,75	86,80	86,85	86,85
	Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri	%	19,05	19,05	19,05	23,81	23,81	28,57	28,57	28,57

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Kecamatan Taman yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2024	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggunjawab
					Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	KECAMATAN	Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan	Angka	4	4	4	5	5	6	6		
		Nilai SKM	Nilai	85,025	86,60	86,65	86,70	86,75	86,80	86,85		
		Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri	%	19,05	19,05	19,05	23,81	23,81	28,57	28,57		
7.01.01	**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**											
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	dokumen	2	2	2	2	2	2	2		Subbagian Bina Program dan Keuangan
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	dokumen	2	2	2	2	2	2	2		Subbagian Bina Program dan Keuangan
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	dokumen	1	1	1	1	1	1	1		Subbagian Bina Program dan Keuangan

https://jdih.pemalangkab.go.id

7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang disusun	dokumen	1	1	1	1	1	1	1		Subbagian Bina Program dan Keuangan
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang disusun	dokumen	1	1	1	1	1	1	1		Subbagian Bina Program dan Keuangan
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	dokumen	4	4	4	4	4	4	4		Subbagian Bina Program dan Keuangan
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	dokumen	4	4	4	4	4	4	4		Subbagian Bina Program dan Keuangan
7.01.01.2.03	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang tersedia gaji dan tunjangan	orang/bulan	30/12	30/12	30/12	30/12	30/12	30/12	30/12		Subbagian Bina Program dan Keuangan
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	dokumen	2	2	2	2	2	2	2		Subbagian Bina Program dan Keuangan
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD	laporan	4	4	4	4	4	4	4		Subbagian Bina Program dan Keuangan
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											

https://jdih.pemalangkab.go.id

7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	30	30	30	30	30	30	30		Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	12	12	12	12	12	12		Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	12	12	12	12	12	12		Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang disediakan	Paket	12	12	12	12	12	12	12		Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jenis surat kabar yang disediakan	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12		Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Laporan	12	12	12	12	12	12	12		Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jenis Arsip Dinamis pada SKPD yang tertata	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1		Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.0007	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	4	4	4	4	4	4		Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.0008	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											
7.01.	Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12		Subbagian

https://jdih.pemalangkab.go.id

01.2.08.0001	Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12		Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12		Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	15	15	15	15	15	15		Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	14	14	14	14	14	14	14		Seksi Tata Pemerintahan
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											
7.01.02.2.01.02	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerinah dan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerinah dan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	laporan	4	4	4	4	4	4	4		Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7.01.02.2.01.0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4		Seksi Tata Pemerintahan

https://jdih.pemalangkab.go.id

002		Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
7.01.0 2.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											
7.01.0 2.2.02. 0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12		Seksi Pelayanan
7.01.0 2.2.02. 0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4	4	4	4	4	4		Seksi Pelayanan
7.01.0 2.2.02. 0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4	4	4	4	4	4		Seksi Pelayanan
7.01.0 2.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											
7.01.0 2.2.04.00 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12		Seksi Pelayanan
7.01.0 2.2.04.00 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12		Seksi Pelayanan
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											
7.01.0 3.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											

https://jdih.pemalangkab.go.id

7.01.0 3.2.01. 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga kemasyarakatan	19	19	19	19	19	19	19		Seksi PMD
7.01.0 3.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1		Seksi PMD
7.01.0 3.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	1	1	1	1	1		Seksi PMD
7.01.0 3.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											
7.01.0 3.2.03. 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga kemasyarakatan	3	3	3	3	3	3	3		Seksi PMD
7.01.0 4.2.01	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											
7.01.0 4.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											
7.01.0 4.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12		Seksi Trantibum
7.01.	**Koordinasi Penerapan dan**											

https://jdih.pemalangkab.go.id

0 4.2.0 2	**Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**											
7.01. 04.2. 02.0 1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia	lap	4	4	4	4	4	4	4		Seksi Trantibum
7.01. 0 5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											
7.01. 0 5.2.0 1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**											
7.01. 0 5.2.0 1. 0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	100	100	100	100	100	100	100		Seksi Trantib
7.01. 0 5.2.0 1. 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12		Seksi Tata Pemerintahan

https://jdih.pemalangkab.go.id

7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**											
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**											
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	19	19	19	19	19	19	19		Seksi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	21	21	21	21	21	21	21		Seksi PMD
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	21	21	21	21	21	21	21		Seksi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	19	19	19	19	19	19	19		Seksi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	16	16	16	16	16	16	16		Seksi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	19	19	19	19	19	19	19		Seksi Tata Pemerintahan
7.01.06	Rekomendasi Pengangkatan dan	Jumlah Dokumen Rekomendasi	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4		Seksi PMD

https://jdih.pemalangkab.go.id

6.2.01.0008	Pemberhentian Perangkat Desa	Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa										
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4		Seksi PMD
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	19	19	19	19	19	19	19		Seksi Tata Pemerintahan
KELURAHAN WANAREJAN SELATAN												
7.01.01	**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**											
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	12	12	12	12	12	12		Seksi Pemerintahan
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	12	12	12	12	12	12		Seksi Pemerintahan
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang disediakan	Paket	12	12	12	12	12	12	12		Seksi Pemerintahan
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jenis surat kabar yang disediakan	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12		Seksi Pemerintahan
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Laporan	12	12	12	12	12	12	12		Seksi Pemerintahan
7.01.01.2.	**Pengadaan Barang Milik Daerah**											

https://jdih.pemalangkab.go.id

0007	**Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	2	2	2	2	2		Seksi Pemerintahan
7.01.01.2.0008	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12		Seksi Pemerintahan
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12		Seksi Pemerintahan
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	5	5	5	5	5	5		Seksi Pemerintahan
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	6	6	6	6	6	6		Seksi Pemerintahan
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											
7.01.03.2.02	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	lembaga kemasyarakatan	3	3	3	3	3	3	3		Seksi Ekonomi Pembangunan dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

		Perencanaan Pembangunan di Desa										Kesejahteraan Sosial
7.01.03.2.01.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun	unit	1	1	1	1	1	1	1		Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/ ormas	3	3	3	3	3	3	3		Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial
7.01.04.2.01	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12		Seksi Pemerintahan
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**											
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	Orang	100	100	100	100	100	100	100		Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial

https://jdih.pemalangkab.go.id

	1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										
KELURAHAN BEJI												
7.01.01	**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**											
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	5	5	5	5	5	5	5		Seksi Pemerintahan
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	12	12	12	12	12	12		Seksi Pemerintahan
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang disediakan	Paket	12	12	12	12	12	12	12		Seksi Pemerintahan
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jenis surat kabar yang disediakan	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12		Seksi Pemerintahan
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Laporan	12	12	12	12	12	12	12		Seksi Pemerintahan
7.01.01.2.0008	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											
7.01.01.2.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	12	12	12	12	12	12	12		Sekretaris

https://jdih.pemalangkab.go.id

08.0 001		Surat Menyurat										
7.01. 01.2. 08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12		Sekretaris
7.01. 01.2. 08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12		Sekretaris
7.01. 01.2. 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											
7.01. 01.2. 09.0 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	5	5	5	5	5	5		Seksi Pemerintah an
7.01. 01.2. 09.0 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	6	6	6	6	6	6		Seksi Pemerintah an
7.01. 01.2. 09.0 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhab/ dipelihara	unit	1	1	1	1	1	1	1		Seksi Pemerintah an
7.01. 0 3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											
7.01. 0 3.2.0 2	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											
7.01. 03.2. 01.0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	lembaga kemasyar akatan	4	4	4	4	4	4	4		Seksi Ekonomi Pembangu nan dan Kesejahter aan Sosial
7.01. 03.2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana yang	unit	2	2	2	2	2	2	2		Seksi Ekonomi

https://jdih.pemalangkab.go.id

01.0		terbangun										Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/ ormas	3	3	3	3	3	3	3		Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											
7.01.03.2.03. 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga kemasyarakatan	2	2	2	2	2	2	2		Sekretaris
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**											
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	100	100	100	100	100	100	100		Seksi Pemerintahan

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.3 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama, RPJMD, dan Pendanaan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.8.
Sub Kegiatan prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	
			Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	
			Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	
			Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
3	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum**	**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
5	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama**	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	
			Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
			Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	**Program Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintahan Desa**	**Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa**	**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
			Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.4 Uraian Sub Kegiatan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Taman adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Taman

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN KE						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Jumlah Desa / kelurahan mandiri di Kecamatan	Desa / Kelurahan	4	4	4	5	5	6	6	
2	Nilai SKM	Nilai	85,025	86,60	86,65	86,70	86,75	86,80	86,85	
3	Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri	%	19,05	19,05	19,05	23,81	23,81	28,57	28,57	

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja kunci (IKK) adalah urusan keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Taman dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.10.
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Taman

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2929	2030	
NIHIL										

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Penunjang Pemerintahan Daerah untuk periode tahun 2025 - 2029. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang / urusan Penunjang Pemerintahan Daerah dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pemalang yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029. Sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L dan Renstra Pemerintah Provinsi untuk tercapainya sasaran pembangunan di Kabupaten Pemalang.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Kecamatan Taman ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Taman. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman bersama dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Taman serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Pemalang. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Taman merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan atau target kinerja sasaran Kecamatan Taman. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Kecamatan Taman yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Taman harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKJIP) Kecamatan Taman. Laporan Kinerja (LKJIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Kecamatan Taman di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Taman ini.

Taman, Juli 2025

CAMAT TAMAN

Drs. SUKISMAN, M.A
Pembina Tk. I
NIP. 19671220 199412 1 001

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang adalah dokumen perencanaan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang untuk periode lima tahun 2025-2029, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik, serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan pelayanan publik yang baik dan mewujudkan masyarakat desa/kelurahan yang aktif. Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, hal ini sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Renstra Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang untuk Tahun 2025-2029. Selain itu Renstra Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Proses penyusunan Renstra meliputi beberapa tahapan, yaitu:

(1) Persiapan Penyusunan Renstra PD, terdiri dari pembentukan tim penyusun Renstra PD, orientasi mengenai Renstra PD, agenda kerja tim penyusun Renstra PD, penyiapan data dan informasi; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD; (3) Penyusunan Rancangan Renstra PD; (4) Forum Perangkat Daerah; (5) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD; dan (6) Penetapan Renstra PD.

Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Petarukan Tahun 2021-2026 disajikan dalam bagan berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra Kecamatan Petarukan Tahun 2025-2029

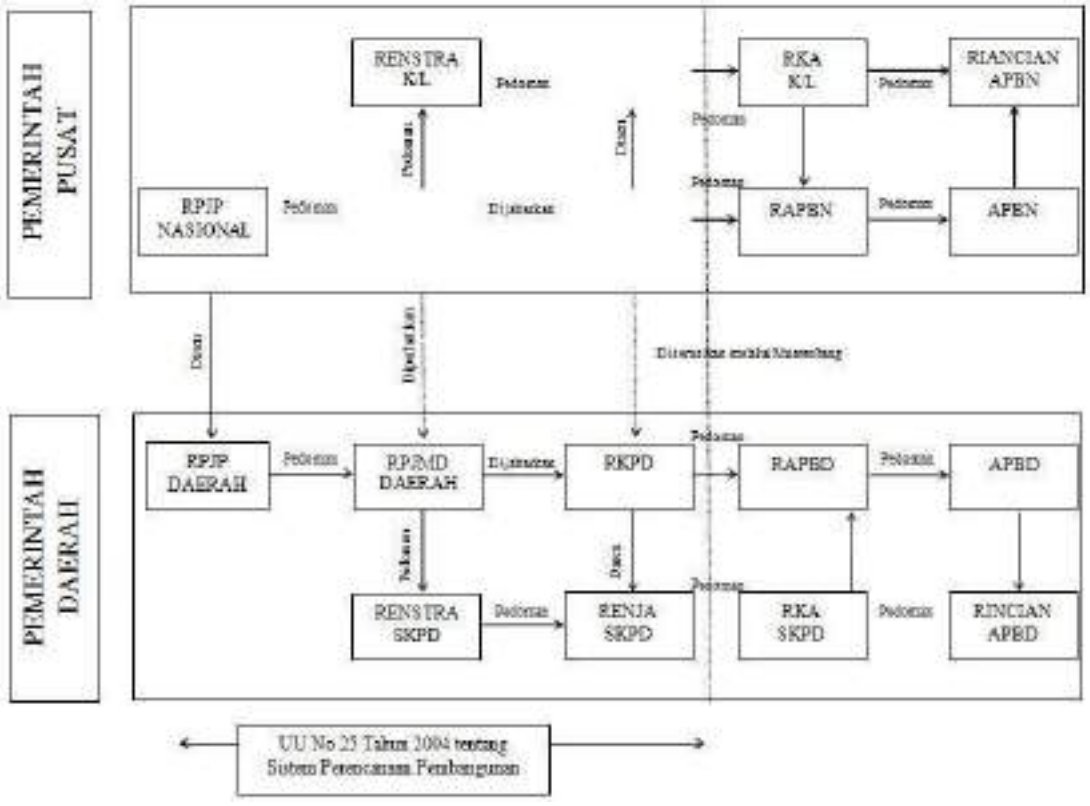

https://jdih.pemalangkab.go.id

Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut :

Gambar 1.2
Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

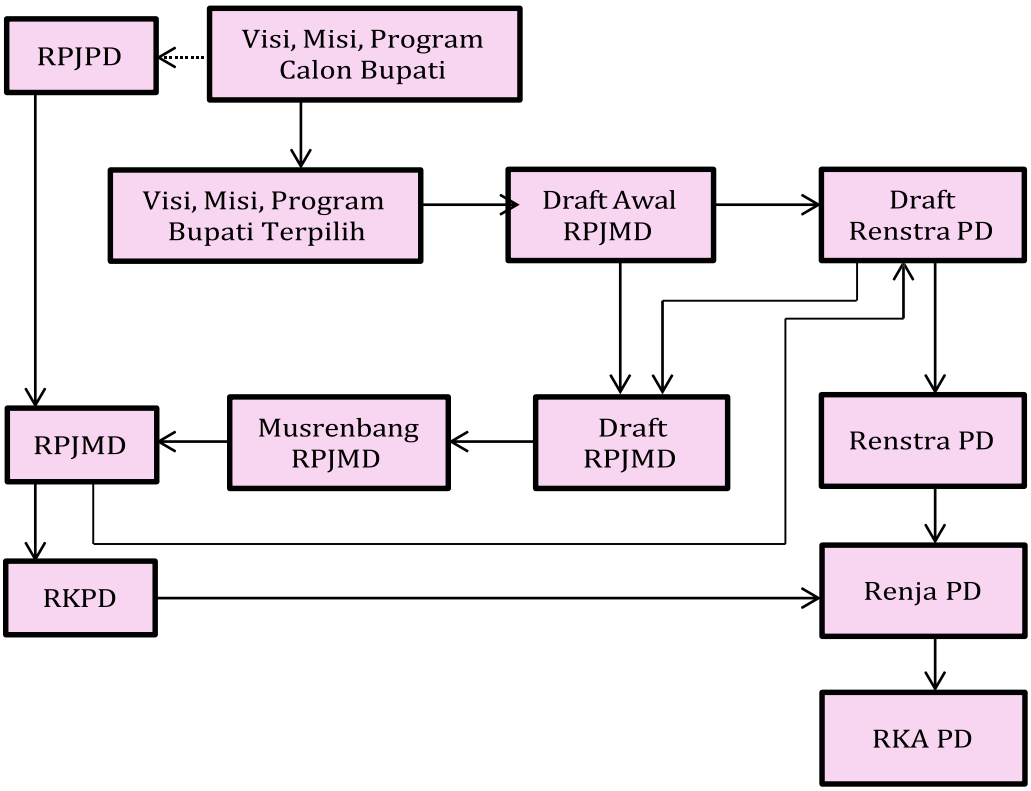

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Kecamatan Petarukan Tahun 2025-2029, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah

https://jdih.pemalangkab.go.id

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

https://jdih.pemalangkab.go.id

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

https://jdih.pemalangkab.go.id

19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
26. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
27. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
28. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang;
29. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1) Sebagai penjabaran atas RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Petarukan.
2) Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang selama kurun waktu 5 tahun 2025-2029.

https://jdih.pemalangkab.go.id

1.3.2 Tujuan

Adapun Tujuan dari penyusunan Renstra 2025-2029 Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang yaitu:

1) Mewujudkan kinerja selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NPSK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
2) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan penunjang selama kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Petarukan dalam mendukung tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah Kabupaten Pemalang.
3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Petarukan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang setiap tahunnya.
4) Sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Petarukan Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;

https://jdih.pemalangkab.go.id

4. Sistematika penulisan;

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
   a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
   b. Sumber daya Perangkat Daerah;
   c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
   d. Kelompok sasaran layanan
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
   a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah;
   b. Isu strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029;
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029;
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029;
4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 205-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indicator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;

https://jdih.pemalangkab.go.id

5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Kondisi Geografis dan Administratif

Kecamatan Petarukan merupakan salah satu kecamatan yang terletak di bagian utara Kabupaten Pemalang, di pesisir pantai utara laut jawa. Memiliki luas wilayah ±81,29 km^2 ketinggian wilayah berkisar antara 0-8 meter di atas permukaan laut terdiri dari 66,84% adalah wilayah pertanian dam sisanya 33,16% adalah wilayah non pertanian, yang membawahi 1 Kelurahan dan 19 desa. Didominasi oleh dataran rendah yang dilalui oleh sungai. Lebih dari 66% wilayahnya merupakan wilayah pertanian. penghasil utama tanaman pangan padi sawah, sayuran seperti kacang panjang dan ketimun, serta buah pepaya.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Petarukan

Kecamatan Petarukan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 77).

A. Tugas dan Fungsi

Dengan dibentuknya Satuan Kerja Perangkat Daerah maka tugas pokok dan fungsinya perlu dituangkan untuk melaksanakan urusan wajib Kantor Camat Petarukan.

a. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Camat mempunyai uraian tugas :

1. Mengarahkan penyusunan dokumen perencanaan kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan organisasi, perencanaan partisipatif dan perencanaan yang lebih tinggi dan ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Merumuskan kebijakan kecamatan sesuai dengan

https://jdih.pemalangkab.go.id

tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

3. Merumuskan inovasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
4. Mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan kecamatan, meliputi kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum,pelayanan umum dan kesekretariatan sesuai dengan tugas fungsi dan pedoman pelaksanaan agar tepat sasaran dan tujuan;
5. Mengarahkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan dengan melalui bimbingan, supervisi, fasilitasi dan evaluasi guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan;
6. Mengarahkan penyediaan dan pelayaan informasi publik serta penyusunan data dan informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
7. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsinya guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh PD kabupaten yang ada di kecamatan sesuai dengan petunjuk pimpinan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
9. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan Peraturan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;

https://jdih.pemalangkab.go.id

10. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Merumuskan laporan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kerja organisasi.

b. Sekertaris Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan kesekretariatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian sesuai dengan kebituhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

pemutakhiran informasi publik;

5. Mengoordinasikan penyusunan kondep inovasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
9. Melaksanakan tugas dan kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

1) Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :

- Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
- Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Menyusun konsep dokumen perencanaan Kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan oprganisasi, perencanaan partisipatif, dan perencanaanyang lebih tinggi guna dirumuskan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

https://jdih.pemalangkab.go.id

- Menyusun konsep laporan capaian kinerja Kecamatan yang meliputi LkjIP, laporan pelaksanaan APBD dan laporan kinerja lain berdasarkan Renja dan realisasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib adminstrasi;
- Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan keuangan;
- Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi LRA, LO, LPE, neraca dan CaLK serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;
- Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
- Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
- Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi

https://jdih.pemalangkab.go.id

dan pertanggungjawaban kepasa pimpinan; dan

- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

- Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
- Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai sengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Mengelola kegiatan administrasi surat menyurat, kepegawaian, penataan arsip, dokumentas, dan kearsipan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
- Mengelola kegiatan kerumahtanggaan meliputi penyediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, pelayanan tamu dinas dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- Mengelola administrasi barang milik daerah yang meliputi penyusunan analisa kebutuhan dan pemeliharaan barang, penatausahaan barang, dan penyusunan administrasi barang lainnya sesuai dengan peraturan pengelolaan barang milik daerah guna tertib administrasi;
- Mengelola kegiatan ketatalaksanaan meliputi penyusunan standart dan prosedur kerja sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- Mengelola kegiatan kehumasan dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

keprotokolan meliputi penyediaan dan pelayanan informasi publik, penyusunan data informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian, pengaturan tata tempat dan tata acara serta kegiatan kehumasan dan keprotokolan lain sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

C. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
b. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta, dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan

https://jdih.pemalangkab.go.id

pelaksanaan kegiatan;

d. Menyusun konsep rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan memeriksa berkas yang diajukan kepala desa sebagai bahan konsultasi kepada pimpinan guna disahkan oleh pimpinan;
e. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan melalui fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, fasilitasi pemberian tunjangan perangkat desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;
f. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
g. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Seksi Tata Pemerintahan meliputi data monografi desa, data perangkat desa dan data terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
h. Menyusun konsep motivasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;

https://jdih.pemalangkab.go.id

i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

D. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
b. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, keagamaan, pembinaan kesehatan, keluarga berencana, organisasi perempuan, pendidikan, pemuda dan olahraga dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
d. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan sosial desa melalui fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pembangunan desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjaama desa

https://jdih.pemalangkab.go.id

dengan pihak ketiga, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, koordinasi pendampingan desa, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial guna tertib administrasi dan kelancaran dan penyelenggaraan pemerintahan desa;

e. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dengan melibatkan stakeholder terkait demi tercapainya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran;
f. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
g. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
h. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
j. Menyusun laporan dan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawabkan kepada pimpinan; dan
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

https://jdih.pemalangkab.go.id

E. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
b. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan meliputi fasilitasi pengaduan masyarakat, kejadian musibag, bencana umum atau kejadian luar biasa lainnya serta upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lainnya dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan pemuka agama/tokoh masyarakat serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum;
d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau desa/kelurahan serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna tegaknya peraturan;
e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah yang ada di wilayah kecamatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dan/atau swasta dan/atau pihak terkait lainnya sesuai dengan prosesur dan ketentuan peraturan

https://jdih.pemalangkab.go.id

perundang- undangan guna keamanan dan terpeliharanya prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah;

f. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan yang bergerak di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
g. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
h. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kebutuhan informasi publik;
i. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

https://jdih.pemalangkab.go.id

F. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi. sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
b. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. Melaksanakan kegiatan koordinasi terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan dan kabupaten, pemerintah desa/kelurahan, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
d. Menyusun konsep rencana operasional dan standar pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
e. Melaksanakan kegiatan fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan di bidang perizinan, non perizinan, administrasi pertanahan dan pelayanan administrasi lainnya sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dan pemeriksaan dokumen/berkas permohonan, cek lokasi apabila disyaratkan, pengesahan hingga penyampaian kembali dokumen/berkas kepada pemohon guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
f. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan prosedur dan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
g. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tercapainya

https://jdih.pemalangkab.go.id

kepuasan masyarakat;

h. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
i. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
j. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Guna mengimplementasikan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tata kerja tersebut, maka struktur organisasi Kecamatan Petarukan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Petarukan

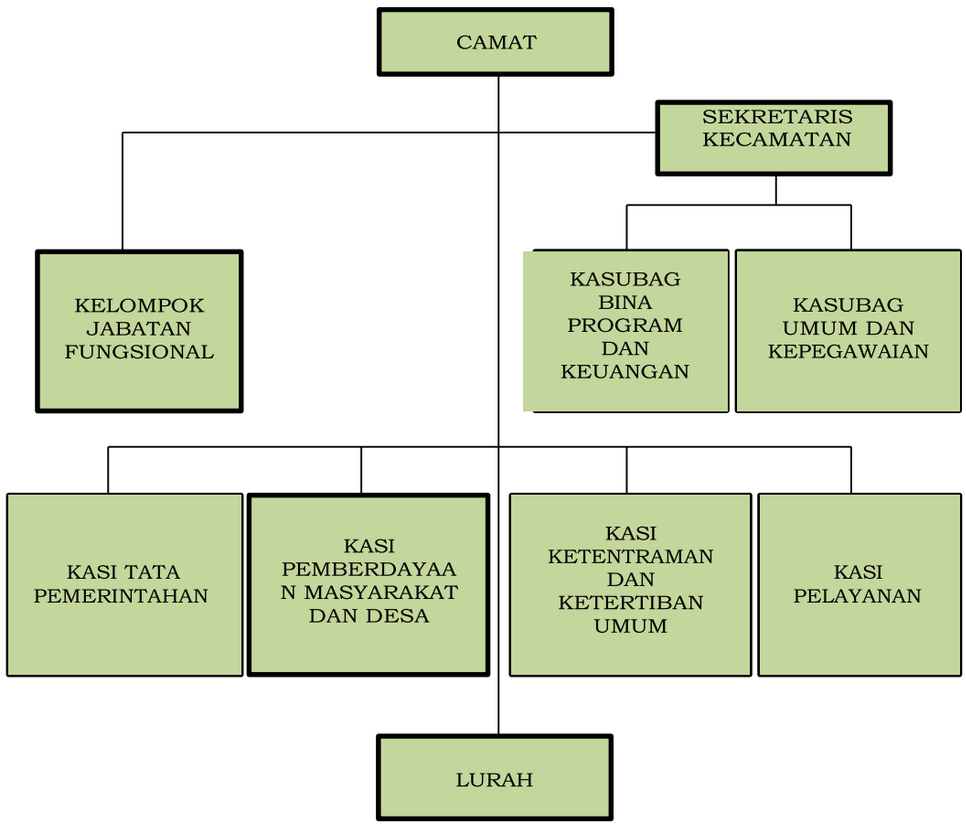

(Sumber: *Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang).*

2.2 Demografi dan Sosial Ekonomi

Jumlah penduduk di Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah mencapai 180.084 jiwa. Dari jumlah tersebut, 91.387 adalah laki-laki dan 88.661 adalah perempuan. Kepadatan penduduk Petarukan adalah 2.215 jiwa/km². Kelurahan Petarukan memiliki jumlah penduduk terbanyak, yaitu 21.316 jiwa, sedangkan Desa Kalirandu memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 5.525 jiwa/km². Mata pencaharian utama di Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, adalah pertanian, terutama tanaman pangan seperti padi, sayuran, dan buah-buahan. Selain itu, peternakan juga berkembang, terutama itik dan puyuh. Perdagangan juga menjadi

https://jdih.pemalangkab.go.id

sumber mata pencaharian penting, dengan adanya pasar tradisional dan swalayan yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat.

2.3. Sumber Daya Kecamatan Petarukan

2.3.1 Susunan Kepegawaian

Pegawai merupakan sumber daya penting yang perlu dikelola secara baik, oleh karena itu Kantor Camat Petarukan didukung pegawai seperti diuraikan dalam tabel:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

Eselon / NonEselon	Pendidikan							Golongan		
	S2	S1	D3	D2	SLT A	SLT P	SD	III	II	I
Eselon										
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-
IV	3	7	-	-	-	-	-	2	8	-	-
Jumlah	**3**	**9**	-	-	-	-	-	**3**	**9**	-	-
Non Eselon	-	4	1	-	6	-	-	-	6	5	-
Total	**3**	**13**	**1**	**-**	**6**	**-**	**-**	**3**	**15**	**5**	**-**

Sumber : Sekretariat Kecamatan Petarukan, 2025

Pegawai Kecamatan Petarukan berjumlah 23 orang, selanjutnya jumlah pegawai berdasar golongan golongan II sebanyak 5 orang, golongan III sebanyak 15 orang dan golongan IV sebanyak 3 orang.

2.3.2 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di kecamatan telah dilengkapi dengan gedung gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Walaupun jumlah dan jenis sarana dan prasarana kerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengingat beban kerja yang semakin meningkat sehingga diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Salah satunya perlu dilakukan penambahan dan pergantian berbagai sarana dan prasarana terutama pemeliharaan gedung kantor, perangkat komputer, penambahan

https://jdih.pemalangkab.go.id

meubelier seperti lemari arsip, meja kerja,kursi kerja dan kebutuhan- kebutuhan lainnya yang di anggap perlu sebagai penunjang terlaksananya pelayanan yang prima kepada masyarakat. Adapun perlengkapan Kantor Camat Petarukan sampai pada saat ini seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2

Perlengkapan Kantor Camat Petarukan

No.	Jenis Bangunan	Jumlah Barang	Keterangan
1.	Filing Kabinet	12	Baik
2.	White Board	2	Baik
3.	Kursi Rapat	38	Baik
4.	Wireles	1	Baik
5.	Kursi Kerja Non Struktural	6	Baik
6.	Powe Supply	1	Rusak
7.	Layar Film	2	Rusak
8.	Sound System	1	Baik
9.	Printer	11	Baik
10.	Kursi Kayu	30	Baik
11.	Laptop	5	Baik
12.	Router	1	Baik
13.	Meja Rapat	11	Baik
14.	AC 1 PK	4	Baik
15.	AC 2 PK	2	Baik
16.	Hub	1	Rusak
17.	Kursi Kayu	61	Baik
18.	Meja panjang	7	Baik
19.	Proyektor	1	Baik
20.	Bangku Tunggu	2	Baik
21.	TV	2	Rusak
22.	Rak Kayu	8	Rusak
23.	Mesin Absensi	2	Baik
24.	Meja Kerja/Metal	2	Rusak
25.	Kipas	4	Rusak
26.	Kursi Rapat	38	Baik

Sumber : Sekretariat Kecamatan Petarukan, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.3.2 Administrasi Kewilayahan

Terdapat 20 desa/kelurahan di Kecamatan Petarukan dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.3

Administrasi Kewilayahan Kecamatan Petarukan

No	Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT	Jumlah Perangkat Desa	Jumlah Linmas
1	Kendalsari	6	6	39	14	76
2	Widodaren	7	7	50	15	54
3	Karangasem	3	3	30	11	28
4	Petanjungan	3	3	48	11	36
5	Sirangkang	3	3	16	11	24
6	Iser	2	4	19	10	30
7	Serang	4	6	36	12	46
8	Petarukan	8	16	112	13	122
9	Kalirandu	5	5	48	13	60
10	Pesucen	5	9	47	13	50
11	Panjunan	2	4	22	10	24
12	Temuireng	6	6	44	14	36
13	Pegundan	4	8	62	12	70
14	Bulu	2	2	20	10	36
15	Tegalmlati	5	5	40	13	46
16	Loning	3	3	43	11	54
17	Klareyan	4	4	33	12	80
18	Kendaldoyong	4	4	41	12	76
19	Nyamplungsari	4	4	32	12	40
20	Kendalrejo	3	3	25	10	52
Jumlah		**83**	**105**	**807**	**239**	**1040**

Sumber : Sekretariat Kecamatan Petarukan, 2025

Kecamatan Petarukan terdiri dari 19 desa dan 1 kelurahan, 767 RT dan 105 RW. Untuk menjaga ketentraman dan ketertiban wilayah, Kecamatan didukung oleh 1040 personil Linmas.

2.3.3 Kinerja pelayanan Kecamatan Petarukan bisa dilihat pada tabel berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan
Petarukan Kabupaten Pemalang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Cakupan layanan masyarakat	%	-		93,33	94,33	96	100	94,22	94,22	100	100	100	-	100,95	100,60	100,41	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kecamatan	indeks	-	85,36	85,4	85,5	86	87,61	85,36	82,75	87,61	83,22	84,56	100	96,89	102,46	96,76	96,51
3	SAKIP	nilai	-	33,75	33,75	45,42	34,50	60,40	33,75	34,28	45,42	51,20	60,98	100	100	100	100,48	100,96
4	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	indeks	-	35,34	35,34	35,50	35,50	36,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan publik	%	-	91,11	91,11	91,11	91,11	91,11	83	83	91	100	100	91,09	91,09	99,87	100,97	109,76
6	Persentase Masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%	-	100	100	100	100	100	100	100	100	99,17	100	100	100	100	99,17	100
7	Persentase gangguan trantibum Tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%	-	100	100	100	100	100	100	100	80	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase potensi konflik Tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,76	100	100	100	100	99,76
9	Persentase desa bertata Kelola pemerintahan baik	%	-	80	80	83,33	83,33	86,67	83	83	83	100	78,95	103,75	103,75	99,60	100,20	91,09

https://jdih.pemalangkab.go.id

Berdasarkan tabel 2.4 dapat diketahui pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Petarukan selama tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Melebihi target terakhir atau sama dengan target terakhir, meliputi:
   - Cakupan layanan masyarakat
   - SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
   - Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan publik
   - Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif
   - Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan

Adapun faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan yang telah terjadi adalah sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas SDM untuk memberikan pelayanan prima
- Adanya komitmen bersama seluruh pegawai di kecamatan petarukan dalam meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- Adanya evaluasi perbaikan berkelanjutan
- Peningkatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di seluruh wilayah kecamatan petarukan
- Peningkatan kualitas pelaporan kinerja

2. Tidak memenuhi target terakhir, meliputi :
   - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kecamatan
   - Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani
   - Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik

Adapun faktor penghambat dalam mencapai keberhasilan yakni sebagai berikut:

- Kurangnya sarana prasarana layanan administrasi kepegawaian;
- Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- Meningkatkan Pembinaan terkait pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- Menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas dan terukur;
- Melakukan monitoring dan evaluasi;

https://jdih.pemalangkab.go.id

- Analisis terhadap sumber daya finansial yang tersedia dan rencanakan alokasi dana untuk mendukung pencapaian target. Pastikan anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan.

Dengan melaksanakan analisis dan langkah-langkah perbaikan yang komprehensif, diharapkan kinerja di masa mendatang dapat meningkat secara signifikan. Upaya ini memerlukan kolaborasi dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai hasil yang optimal.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pengembangan pelayanan perangkat daerah menghadapi tantangan internal dan eksternal, namun juga menyimpan peluang untuk peningkatan kualitas layanan. Sumber daya, kurangnya infrastruktur, serta peningkatan kapasitas SDM. Peluangnya terletak pada pemanfaatan teknologi, peningkatan partisipasi masyarakat, dan perbaikan tata kelola. Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, pelayanan perangkat daerah dapat ditingkatkan untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

2.4.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Petarukan

Kecamatan Petarukan dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Petarukan tahun 2025-2029, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan

https://jdih.pemalangkab.go.id

pelayanan Kecamatan Petarukan adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya integrasi sistem informasi pendukung penyelenggaraan pemerintahan. Di tingkat kecamatan sistem yang ada belum sepenuhnya terintegrasi sehingga masih sering terjadi miskomunikasi dan ketidakakuratan data.
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
3. Minimnya anggaran untuk inovasi, keterbatasan anggaran menghambat penerapan teknologi pelayanan modern dan inovasi dalam pelayanan.
4. Kurangnya infrastruktur digital, tidak semua kecamatan memiliki sistem pelayanan berbasis digital. Sehingga pelayanan masih dilakukan secara manual, memperlambat proses dan meningkatkan resiko kesalahan.
5. Sumber daya manusia yang terbatas, tidak semua pegawai kecamatan memiliki ketrampilan digital yang cukup, dan pelatihan yang kurang dapat menghambat adopsi teknologi.
6. Pemenuhan dan perbaikan sarpras kecamatan.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Petarukan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya database di Kecamatan yang menyajikan semua kegiatan di berbagai seksi. Sehingga data yang ada dapat dijadikan rujukan bagi yang membutuhkan.
2. Diperlukan adanya bimtek sebagai upaya peningkatan kapasitas bagi aparatur desa dan kelurahan di bidang perencanaan serta pengawasan.
3. Perlu adanya pengajuan anggaran khusus ke pemerintah kabupaten untuk membiayai kegiatan inovasi dalam pelayanan terkait teknologi.
4. Perlu didukung anggaran dari pemerintah kabupaten untuk pengadaan sarana dan prasarana teknologi digital di kecamatan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

5. Perlu penambahan sumber daya manusia di kecamatan yang memiliki kompetensi dibidang digital, dan dilaksanakan pelatihan ketrampilan terhadap sdm yang akan ditempatkan menjadi

https://jdih.pemalangkab.go.id

6. operator untuk menangani aplikasi digital yang ada di kecamatan baik di bidang pelayanan, pelayanan kepada masyarakat maupun dibidang pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
7. Perlu adanya perencanaan anggaran yang digunakan untuk pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana yang ada di kecamatan.

Tabel 2.5
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Petarukan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya pelayanan umum di Kecamatan Petarukan	SDM Pelayanan belum optimal dalam manajemen keefisien waktu	Masih terbatasnya ketersediaan peralatan pelayanan
		Belum tersedianya saranan dan prasarana pelayanan umum yang memadai	Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan
		Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Petarukan	Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai SOP Standar Operasional Prosedur Pelayanan
2.	Belum meratanya pembangunan di wilayah Kecamatan Petarukan	Belum optimalnya bantuan sosial masyarakat	Data penerimaan bantuan tidak akurat menyebabkan distribusi bansos belum tepat sasaran
		Infrastruktur yang belum merata	Masih terbatasnya anggaran untuk infrastruktur terutama di Kelurahan
			Masih banyaknya jalan rusak di wilayah Kelurahan Petarukan
			Tidak terkelolanya sampah dengan baik
3.	Belum optimalnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Masih kurangnya anggota linmas/hansip yang lebih muda	Masih kurangnya tenaga linmas/hansip dan belum ada reorganisasi ke yang lebih muda di wilayah Kecamatan Petarukan
		Masih rendahnya tingkat Poskampling dan Linmas aktif di Kecamatan Petarukan	Masih kurangnya tingkat keterlibatan serta keaktifan linmas/hansip di desa/kelurahan
		Masih kurangnya	Masih rendahnya

https://jdih.pemalangkab.go.id

		peran serta masyarakat dalam menjaga kantibmas di wilayah lingkungannya	keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan di lingkungan wilayah desa masing-masing
4.	Belum optimalnya administrasi di Desa	Lambatnya penyusunan dan penyampaian dokumen peraturan desa (dokumen akhir tahun APBDes)	Lambatnya penyusunan APBDes karena SDMnya
		Terlambatnya permintaan pengumpulan dan pengiriman data pemerintahan dan kependudukan	Kurangnya kesadaran perangkat desa yang ditugasi dalam melaksanakan tugasnya
5.	Belum Optimalnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Terlambatnya pemerintah desa dalam menyusun dokumen perencanaan seperti RKPDes dan APBDes	Kurangnya sumber daya manusia di tingkat desa yang mempunyai pengetahuan di dalam ilmu perencanaan desa dan kurang optimalnya kinerja penyusun RKPDes dan APBDes

Pengarusutamaan gender diterapkan oleh Kecamatan Petarukan pada kegiatan Musrenbang Kecamatan, dimana perwakilan kelompok perempuan menjadi salah satu komponen peserta. Pengarusutamaan gender diterapkan juga dalam fasilitasi lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yaitu fasilitasi kepada PKK dan Posyandu.

2.5 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Penelaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Petarukan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah :

https://jdih.pemalangkab.go.id

“PEMALANG BERCAHAYA-BERSIH CAKAP HANDAL, MULYA”

Visi ini memiliki pembentuk kata :

1. **Bersih :** Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan.
2. **Cakap :** dimaknai memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
3. **Handal :** dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang Tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.
4. **MULYA** : Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan local sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi Masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius.

   Dalam rangka mencapai visi diatas berikut ini Misi RPJMD 2025-2029 berdasarkan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yaitu:

1. **Misi 1 Resik** : menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih. Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik.
2. **Misi 2 Hijau** : meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan

https://jdih.pemalangkab.go.id

meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sektor unggulan, Pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau, yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan) yang ramah lingkungan, industri hijau Dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM dimasyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.

3. **Misi 3 Apik** : meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penaatan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dari Desa**.**
4. **Misi 4 Peduli** : meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan Masyarakat. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi.
5. **Misi 5 Silaturahmi** : meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan Sejahtera. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, dan saling menghormati dan teposliro**.**
6. **Misi 6 Organisatoris** : meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan *Good Governance, Clean Governance* dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.
7. **Misi 7 Digitalisasi** : memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas Masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Misi ini mengandung pengertian Pemerintah kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi**.**

8. **Misi 8 Ikhlas** : menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkan kearifan dan budaya lokal.

   Sesuai dengan Misi Bupati Pemalang di atas, maka Kecamatan Petarukan mendukung misi Bupati tersebut yaitu **Misi Ke 6 (Organisatoris : meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi.**

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan *Good Governance, Clean Governance* dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik).

   Tujuan untuk mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang adalah sebagai berikut :

   1. Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih sehat dan nyaman.
   2. Meningkatkan daya saing pembangunan daerah
   3. Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
   4. Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, yang menciptakan keamanan dengan nilai-nilai budaya dan kegotong-royongan
   5. Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel.

   Dimana tujuan dari Kecamatan Petarukan adalah **Meningkatnya pelayanan publik yang prima**, sesuai dengan tujuan Bupati yang ke 5 (lima) yaitu meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Sasaran pembangunan jangka menengah adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1 Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih sehat dan nyaman dengan sasarannya : Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan serta pengelolaan sampah.
2. Tujuan 2 Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel dengan sasaran sebagai berikut : Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik.
3. Tujuan 3 Meningkatkan daya saing pembangunan daerah dengan sasaran sebagai berikut :
   a. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi lokal
   b. Meningkatnya kualitas SDM daerah
   c. Meningkatnya kemandirian pangan
   d. Meningkatnya pengendalian harga bahan pokok dan penting
   e. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata
   f. Meningkatnya kualitas pembangunan desa dan Kawasan perdesaan
   g. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender
   h. Meningkatnya kualitas riset dan inovasi
4. Tujuan 4 Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dengan sasaran sebagai berikut :
   a. Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat
   b. Meningkatnya penanganan pengangguran
5. Tujuan 5 Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, yang menciptakan keamanan dengan nilai nilai budaya dan kegotong-royongan dengan sasaran sebagai berikut:
   a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hidup berdampingan secara harmonis dan kondusif

https://jdih.pemalangkab.go.id

b. Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana
c. Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal

Berdasarkan sasaran RPJMD 2025-2029 diatas maka Kecamatan Pertarukan mempunyai 2 (dua) sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan
2. Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.6

Telaah Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati

Misi/Program Prioritas	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong	
Visi : "PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA"					
Misi 6 : Meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi	1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1. Masih terbatasnya pelayanan kepada masyarkat	1. Ruang pelayanan belum memadai 2.Petugas pelayanan belum memiliki sertifikat yang berkaitan dengan pelayanan	1. Perlu adanya peran pimpinan agar ruang pelayanan lebih memadai dengan memasukkan pada rencana anggaran kecamatan 2. Memberi kesempatan kepada petugas pelayanan yang ada untuk mengikuti bimbingan teknis maupun studi banding ke kecamatan lain mapun OPD di sekitar Kab.Pemalang terkait pelayanan publik	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Misi/Program Prioritas	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong	
				Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan	Perlu adanya dukungan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang lebih optimal dari Kecamatan dan Pendamping Desa
	2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	Peran Linmas yang ada di desa/kelurahan lebih dimaksimalkan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan desa/kelurahan
	3. Penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		Belum optimalnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap kondisi di lingkungan sekitar desa/kelurahan dan kecamatan	Adanya FKDM dan Forkompimcam yang siap menangani potensi konfilik ditingkat desa/kelurahan dan kecamatan
	4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Masih terjadi potensi konflik ditingkat desa dan	Masih rendahnya kemampuan/kapasitas dari	Adanya pendamping desa yang mendukung pembinaan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Misi/Program Prioritas	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong	
			kecamatan	aparatur desa/kelurahan dalam tata keloloa pemerintahan	dan pengawasan pemerintah desa
	5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Masih rendahnya desa terkait tata kelola pemerintahan desa	Masih perlu adanya perbaikan serta komitmen dalam manajemen kinerja pada kecamatan	Perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan implementasi SAKIP
	6. Penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		Masih rendahnya nilai SAKIP yang diperoleh		

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.6 Perumusan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu strategis juga merupakan pilihan-pilihan kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan yang kritis yang harus dihadapi untuk menuju kondisi terbaik yang diinginkan. Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan sering menjadi tolok ukur nama baik Kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan ditingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan. Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

a. Kepentingan umum;
b. Kepastian hukum;
c. Kesamaan hak;
d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
e. Keprofesionalan;
f. Partisipatif;
g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
h. Keterbukaan;
i. Akuntabilitas;
j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k. Ketepatan waktu; dan
l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri nomor 4 tahun 2010 yaitu persyaratan subtantif, administratif

https://jdih.pemalangkab.go.id

dan teknis. Secara subtantif kecamatan telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Pemalang dibidang perizinan dan non perizinan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan didukung pula oleh SPP pada tingkat Desa. Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan petugas pelayanan baik dari pegawai kecamatan maupun dengan tenaga teknis pelayanan. Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka kecamatan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable.

Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh Seksi Pemberdayaan dan perekonomian, seksi pemerintahan dan pembangunan serta para Lurah di wilayah Kecamatan Sadaniang yang terdiri dari 6 (enam) kelurahan. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan

https://jdih.pemalangkab.go.id

kecamatan dan Desa antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksananya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

c. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Untuk meningkatkan pembangunan baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik tentu saja memerlukan sumber daya yang memadai, terutama sumber daya aparatur baik itu aparatur Pemerintahan Kecamatan maupun Aparatur Pemerintahan Desa. Kurang dan lemahnya sumber daya aparatur juga mempengaruhi tingkat perkembangan pembangunan baik secara fisik dan non fisik.

d. Peningkatan Fasilitas Pelayanan

Fasilitas pelayanan menjadi salah satu fungsi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan, fasilitas pelayanan dapat berupa SDM maupun Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan sebagai penunjang peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sumber daya yang diperlukan untuk peningkatan pelayanan adalah sumber daya yang telah memahami teknologi secara dasar sehingga mampu mengimplimentasikan pada kegiatan pelayananan tersebut. Sedangkan sarana dan prasarana juga penunjang yang dibutuhkan berupa alat-alat komputer, meubelier, ruangan yang nyaman (ruangan ber-AC) dan lain-lainnya yang menjadi penunjang kebutuhan pelayanan tersebut.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Petarukan

Kecamatan Petarukan dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang pelayanan publik, maka Kecamatan Petarukan harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Kecamatan Petarukan secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat secara umum.

3.1.1. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Petarukan selama tahun 2025–2029 adalah "**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan. Kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan**". Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Petarukan sebagai PD yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dengan tujuan **Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan. Kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan**. Tujuan tersebut diukur dengan indikator jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan.

3.1.2 Sasaran

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Petarukan dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Petarukan selama tahun 2025-2029, adalah "**Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat**". Sasaran tersebut diukur dengan indikator :

1. Nilai SKM adalah Survei Kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan Petarukan semester I dan II pada tahun berjalan. Rumus Nilai SKM adalah = Total dari nilai persepsi per unsur x nilai penimbang.
2. Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri dengan rumus jumlah desa mandiri dibagi jumlah seluruh desa di Kecamatan x 100% .

https://jdih.pemalangkab.go.id

Adapun teknik merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Petarukan dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Teknis Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Petarukan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntable, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah desa / kelurahan mandiri di Kecamatan (Desa / Kelurahan)	3	3	3	3	3	3	
		Meningkatnnya kualitas Pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Nilai SKM (Nilai)	87,61	87,61	87,61	87,61	87,61	87,61	
			Prosentase meningkatnya jumlah Desa Mandiri (%)	15,7	31,57	47,3	63,15	78,9	100	

https://jdih.pemalangkab.go.id

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara yang diambil oleh Kecamatan Petarukan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.2.1 Strategi

Strategi merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditatapkan. Strategi ini akan memperjelas pemikiran- pemikiran secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai dan memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi meliputi penetapan kebijaksanaan dan porgram yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi serta misi. Strategi yang dilakukan Kecamatan Petarukan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Kecamatan Petarukan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk memberikan pelayanan prima
2. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang optimal
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
4. Meningkatnya kualitas pembangunan desa dan kawasan perdesaan
5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi wilayah dan meningkatkan pendapatan daerah melalui Iiklim usaha yang kondusif

3.2.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan dapat berupa ketetapan keputusan tertulis atau tidak tertulis yang disepakati bersama untuk dijadikan pedoman atau tuntunan dalam pelaksanaan setiap kegiatan di lingkungan Kantor Camat Petarukan Kabupaten Pemalang. Selain itu, kebijakan juga dimaksudkan untuk mengarahkan pelaksanaan program-program pemerintah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Arah kebijakan yang ditempuh merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak di lingkungan Kantor Camat Petarukan Kabupaten Pemalang dan ditetapkan oleh pimpinan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Kecamatan Petarukan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)

https://jdih.pemalangkab.go.id

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan sarana dan prasarana di bidang pelayanan kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur di tingkat desa/kelurahan seperti jalan, jembatan, drainase dan saluran irigrasi	Penguatan kelembagaan yang ada di masyarakat seperti lembaga posyandu, LPMD, KPMD, BPD dan RT RW	Mempercepat pembangunan Kecamatan Petarukan untuk mendorong pertumbuhan UMKM guna meningkatkan perekonomian masyarakat	Meningkatkan kondusifitas dan iklim usaha yang nyaman untuk memberikan jaminan pengusaha agar berinvestasi di wilayah kecamatan petarukan

Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Petarukan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Petarukan

NO	OPERASIONALISASI NPSK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN PETARUKAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum	Peningkatan kualitas perencanaan daerah di fokuskan pada transparansi, akuntabilitas perencanaan, dan sinergitas dok pusat dan propinsi Peningkatan kualitas digitalisai pelayanan pemerintahan di fokuskan pada peningkatan tata kelola arsitektur SPBE, mendorong kualitas SMART City dan kualitas layanan aduan Peningkatan kualitas pelayanan publik di fokuskan pada pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan kepuasan pada masyarakat	Penguatan sistem perencanaan, pelayananan pemrintahan dan pengukuran kinerja	
2	Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Pengembangan industri kecil menengah dengan penguatan sentra/kluster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital	Pengembangan pembangunan Kecamatan Petarukan untuk mendorong pertumbuhan UMKM guna meningkatkan perekonomian masyarakat	
3	Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan konduktivitas wilayah dengan peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama dan pemahaman wawasan kebangsaan	Meningkatkan pelatihan limas dan pembinaan masyarakat terkait dengan sistem pengaduan maupun keamanan dan ketertiban	
4	Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa di fokuskan pada peningkatan kualitas eprocurements, kualitas sarana dan prasarana	Meningkatkan sarana dan prasarana di bidang pelayanan kepada masyarakat	
5	Membina dan Mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan / atau kelurahan	Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan difokuskan pada peningktan indeks desa, peningkatan peran BUMDes dalam pembangunan daerah, peningkatan pembinaan dan	Penguatan kelembagaan yang ada di masyarakat seperti lembaga posyandu, LPMD, KPMD, BPD dan RT RW	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	OPERASIONALISASI NPSK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN PETARUKAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		pengawasan kecamatan dalam pembangunan desa/kelurahan dan pengembangan kerjasama antar dan pengembangan kerjasama antar desa		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Strategi Kantor Camat Petarukan mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi. Program dan Kegiatan berdasarkan urusan yang ditangani Kantor Camat Petarukan Kabupaten Petarukan sesuai dengan masing-masing Program. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Petarukan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029 :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
      a. Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
      b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
      a. Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
      b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

https://jdih.pemalangkab.go.id

3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
    a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
    b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
    1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
        a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
        b. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
        c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
    2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
        a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
        b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
        c. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
    1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
        a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
    1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id

a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

F. Program Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintahan Desa

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
   b. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
   c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
   d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
   e. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
   f. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
   g. Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
   h. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
   i. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

https://jdih.pemalangkab.go.id

j. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Petarukan menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanan Kecamatan Petarukan. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Kecamatan Petarukan serta teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Petarukan seperti Tabel berikut :

Gambar 4.1.

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

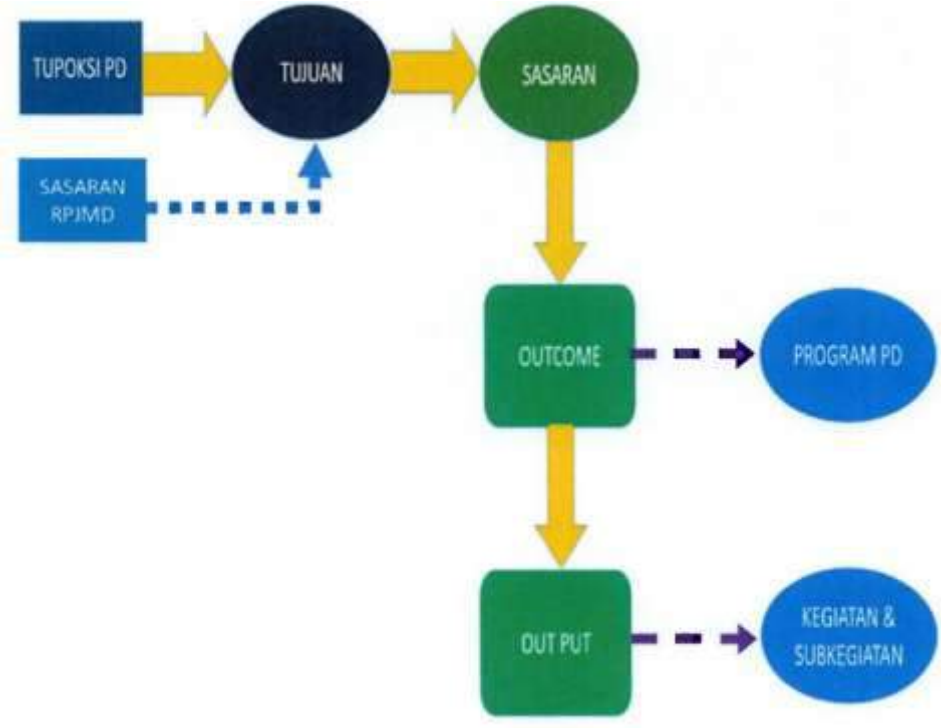

4.2 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan rangkaian aktivitas teknis atau

https://jdih.pemalangkab.go.id

operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama, RPJMD, dan Pendanaan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.1

Sub Kegiatan prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	

https://jdih.pemalangkab.go.id

			terkait dengan Nonperizinan	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
			Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Evaluasi Kelurahan	
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga	

https://jdih.pemalangkab.go.id

			Kemasyarakatan	
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	

https://jdih.pemalangkab.go.id

			Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
			Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
6	Program Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintahan Desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
			Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

			Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.3 Uraian Sub Kegiatan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Petarukan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pemalang

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN KE						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Jumlah Desa/kelurahan mandiri di Kecamatan	Desa/Kelurahan	1	3	3	3	3	3	3	
2	Nilai SKM	Nilai	84,56	87,61	87,61	87,61	87,61	87,61	87,61	
3	Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri	%	0,52	15,7	31,57	47,3	63,15	78,9	100	

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja kunci (IKK) adalah urusan keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian

https://jdih.pemalangkab.go.id

kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Petarukan dapat dijelaskan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	SAT	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2929	2030	
			NIHIL							

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) disusun sebagai pedoman dan acuan bagi sebuah organisasi atau instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, terutama dalam jangka menengah (biasanya 5 tahun). Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan periode Tahun 2025-2029 dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pemalang yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029. Sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian dan Renstra PD Kabupaten Pemalang yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan di Kabupaten Pemalang.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Kecamatan Petarukan ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Petarukan. Renstra ini harus menjadi pedoman bersama dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Petarukan serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Pemalang. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Petarukan merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan dan/atau target kinerja sasaran Kecamatan Petarukan. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Kecamatan Petarukan yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Pemalang harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut

https://jdih.pemalangkab.go.id

disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Kecamatan Petarukan. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Kecamatan Petarukan di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Pemalang ini.

Pemalang, 08 Juli 2025

CAMAT PETARUKAN

Camat Petarukan

Drs. SYAMSUL DEWANTARA

Pembina Tk. I

NIP. 19730923 199303 1 003

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

Kecamatan Comal sebagai salah satu PD harus menyusun Renstra. Penyusunan Renstra Kecamatan Comal sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kecamatan Comal berpedoman pada INMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Comal Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Comal untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Comal serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Renstra menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Comal selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dan merupakan tolak ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan pelayanan publik yang baik dan mewujudkan masyarakat desa/kelurahan yang berdaya.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dokumen Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang. Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut :

Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya

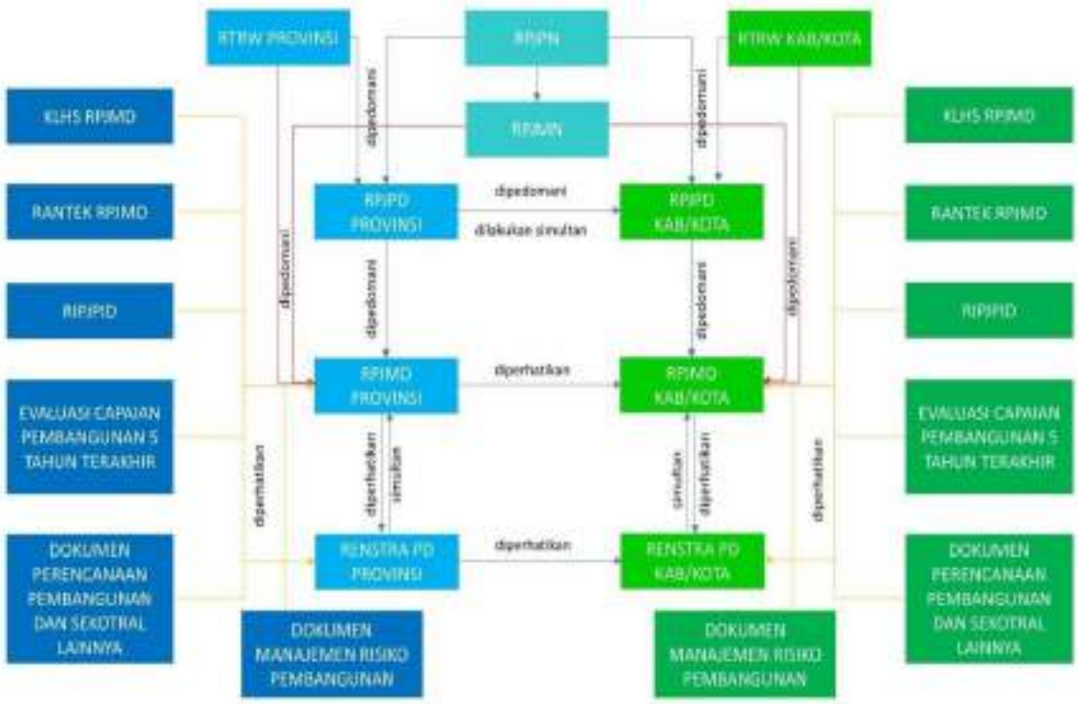

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025-2029, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

https://jdih.pemalangkab.go.id

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

https://jdih.pemalangkab.go.id

9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Resiko Pembangunan nasional;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2050 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang; (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun

https://jdih.pemalangkab.go.id

2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 13);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pemalang tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 7);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor 1312);
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Bupati pemalang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarustamaan Gender;
23. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Adapun tujuan penyusunan Renstra Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2025-2030.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2. Menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah Kabupaten Pemalang selama tahun 2025-2030.
3. Mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan daerah sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Comal, berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Comal, sumber daya Kecamatan Comal, kinerja penyelenggaraan pelayanan pada Kecamatan Comal, permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Comal, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra PD provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan penentuan isu-isu strategis.
3. Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Comal.
4. Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
5. Bab V Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Comal.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN COMAL

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Comal

Kecamatan Comal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Comal mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Comal

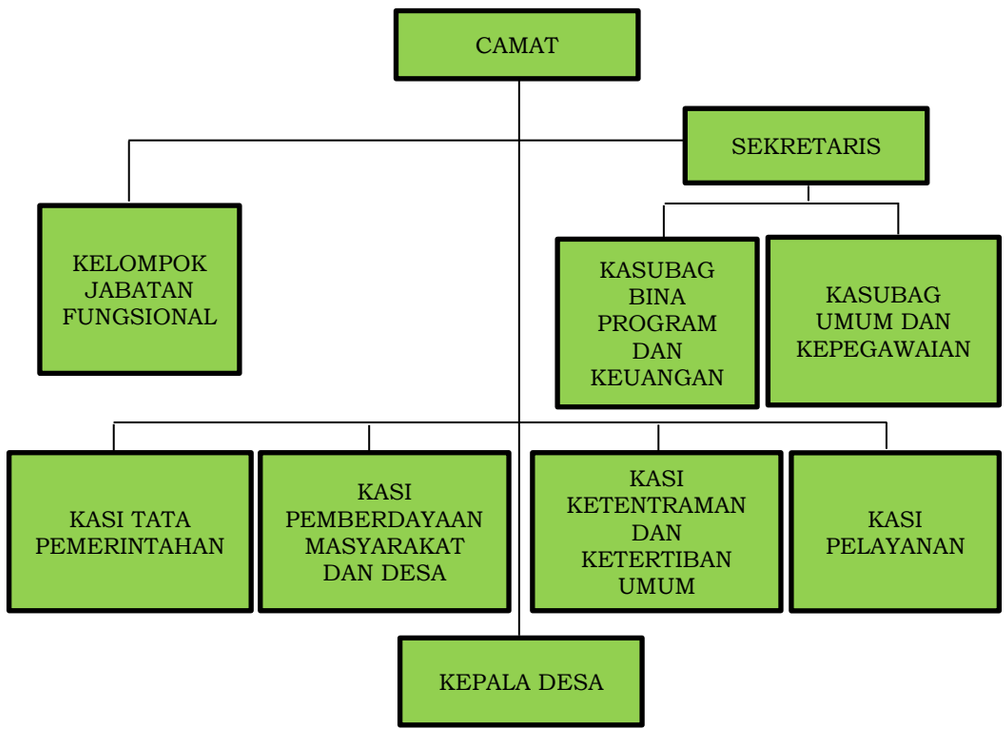

Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

A. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Camat mempunyai uraian tugas :

1. Mengarahkan penyusunan dokumen perencanaan kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan organisasi, perencanaan partisipatif dan perencanaan yang lebih tinggi dan ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Merumuskan kebijakan kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Merumuskan inovasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
4. Mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan kecamatan, meliputi kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan umum dan kesekretariatan sesuai dengan tugas fungsi dan pedoman pelaksanaan agar tepat sasaran dan tujuan;
5. Mengarahkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan dengan melalui bimbingan, supervisi, fasilitasi dan evaluasi guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan;
6. Mengarahkan penyediaan dan pelayaan informasi publik serta penyusunan data dan informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan

https://jdih.pemalangkab.go.id

kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;

7. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsinya guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh PD kabupaten yang ada di kecamatan sesuai dengan petunjuk pimpinan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
9. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan Peraturan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
10. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Merumuskan laporan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kerja organisasi.

B. Sekretaris Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan kesekretariatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan kecamatan dan seluruh seksi

https://jdih.pemalangkab.go.id

dan subbagian sesuai dengan kebituhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;

5. Mengoordinasikan penyusunan kondep inovasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
9. Melaksanakan tugas dan kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

a. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Menyusun konsep dokumen perencanaan Kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan oprganisasi, perencanaan partisipatif, dan perencanaanyang lebih tinggi guna dirumuskan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep laporan capaian kinerja Kecamatan yang meliputi LkjIP, laporan pelaksanaan APBD dan laporan kinerja lain berdasarkan Renja dan realisasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban;
5. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib adminstrasi;

https://jdih.pemalangkab.go.id

6. Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan keuangan;
7. Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi LRA, LO, LPE, neraca dan CaLK serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;
8. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
10. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kecamata sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepasa pimpinan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai sengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengelola kegiatan administrasi surat menyurat, kepegawaian, penataan arsip, dokumentas, dan kearsipan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
4. Mengelola kegiatan kerumahtanggaan meliputi penyediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, penataan

https://jdih.pemalangkab.go.id

ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, pelayanan tamu dinas dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

5. Mengelola administrasi barang milik daerah yang meliputi penyusunan analisa kebutuhan dan pemeliharaan barang, penatausahaan barang, dan penyusunan administrasi barang lainnya sesuai dengan peraturan pengelolaan barang milik daerah guna tertib administrasi;
6. Mengelola kegiatan ketatalaksanaan meliputi penyusunan standart dan prosedur kerja sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Mengelola kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi penyediaan dan pelayanan informasi publik, penyusunan data informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian, pengaturan tata tempat dan tata acara serta kegiatan kehumasan dan keprotokolan lain sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

https://jdih.pemalangkab.go.id

3. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta, dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan memeriksa berkas yang diajukan kepala desa sebagai bahan konsultasi kepada pimpinan guna disahkan oleh pimpinan;
5. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan melalui fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, fasilitasi pemberian tunjangan perangkat desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;
6. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Seksi Tata Pemerintahan meliputi data monografi desa, data perangkat desa dan data terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
8. Menyusun konsep motivasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, keagamaan, pembinaan kesehatan, keluarga berencana, organisasi perempuan, pendidikan, pemuda dan olahraga dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan sosial desa melalui fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pembangunan desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjaama desa dengan pihak ketiga, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, koordinasi pendampingan desa, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial guna tertib administrasi dan kelancaran dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dengan melibatkan stakeholder terkait demi tercapainya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran;
6. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;

https://jdih.pemalangkab.go.id

7. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan dan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawabkan kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan meliputi fasilitasi pengaduan masyarakat, kejadian musibag, bencana umum atau kejadian luar biasa lainnya serta upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lainnya dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan pemuka agama/tokoh masyarakat serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya

https://jdih.pemalangkab.go.id

di bidang penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau desa/kelurahan serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna tegaknya peraturan;

5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah yang ada di wilayah kecamatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dan/atau swasta dan/atau pihak terkait lainnya sesuai dengan prosesur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keamanan dan terpeliharanya prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah;
6. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan yang bergerak di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
7. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kebutuhan informasi publik;
9. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

f. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;

https://jdih.pemalangkab.go.id

2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan kegiatan koordinasi terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan dan kabupaten, pemerintah desa/kelurahan, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep rencana operasional dan standar pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
5. Melaksanakan kegiatan fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan di bidang perizinan, non perizinan, administrasi pertanahan dan pelayanan administrasi lainnya sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dan pemeriksaan dokumen/berkas permohonan, cek lokasi apabila disyaratkan, pengesahan hingga penyampaian kembali dokumen/berkas kepada pemohon guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
6. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan prosedur dan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
7. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tercapainya kepuasan masyarakat;
8. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
9. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
10. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

https://jdih.pemalangkab.go.id

12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2.2. **Sumber Daya Kecamatan Comal**

Sumber daya Kecamatan Comal sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

a. Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Jumlah pegawai di Kecamatan Comal dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyakatan sosial tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.
Pegawai Kecamatan Comal

No	Uraian	Laki- laki	Perempuan	Golongan				Jumlah
				I	II	III	IV	
1	Camat	1					1	1
2	Sekcam	1					1	1
3	Kasubag	1	1			2		2
4	Kasi Kecamatan	2	0			2		2
5	JFU Kecamatan	5	5		4	6		10
6	JFT Kecamatan							
7	Non ASN Kecamatan	3	6					9
8	Lurah	1				1		1
9	Seklur		1			1		1
10	Kasi Kelurahan	2	1			3		3
11	JFU Kelurahan	1	2	1	1	1		3
12	Non ASN Kelurahan	2	3					5
Jumlah		19	19	1	5	16	2	38

Sumber : Sekretariat Kecamatan Comal, 2025

Pegawai Kecamatan Comal berjumlah 38 orang, meliputi 19 orang laki-laki dan 19 orang perempuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Comal laki-laki dan perempuan sudah memenuhi kretiria kesejahteraan jender dikarenakan jumlah antara laki- laki dan perempuan seimbang. Selanjutnya jumlah pegawai berdasar golongan, meliputi golongan I

https://jdih.pemalangkab.go.id

sbanyak 1 orang, golongan II sebanyak 5 orang, golongan III sebanyak 16 orang dan golongan IV sebanyak 2 orang, sehinggadapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Comal dominan bergolongan III yaitu sebanyak 42,11 %.

Tabel 2.2.
Data Pegawai Berdasar Diklat Kepemimpinan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Diklatpim III	2	2	
2	Diklatpim IV	1	1	
3	ADUM			
4	SEPADA			
5	Struktural yang belum diklat	21	11	10
Jumlah		24	14	10

Sumber : Sekretariat Kecamatan Comal, 2025

Jumlah pegawai berdasarkan diklat kepemimpinan pada Kecamatan Comal, yaitu 2 orang sudah mengikuti Diklatpim III, 1 orang sudah mengikuti Diklatpim IV, dan 24 orang belum mengikuti diklat kepemimpinan, hal ini disebabkan masih menunggu penyelenggaraan diklat dari instansi yang berwenang.

Tabel 2.3.
Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pasca Sarjana (S2)	2	2	
2	Sarjana (S1)	15	4	11
3	Diploma	1		1
4	SLTA	4	3	1
5	SLTP	1	1	
6	SD	1	1	
Jumlah		24	11	13

Sumber : Sekretariat Kecamatan Comal, 2025

Jumlah pegawai Kecamatan Comal berdasar tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S2) sebanyak 2 orang, Sarjana (S1) sebanyak 15 orang, Diploma sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 4 orang, SLTP sebanyak 1orang, SD sebanyak 1orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara kualitas SDM di Kecamatan Comal sudah baik dikarenakan pegawai di Kecamatan Comal, dominan berpendidikan SI sebanyak 62,5%.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.4.
Data Pegawai Berdasar Tingkat Eselon

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	IIIA	1	1	
2	IIIB	1	1	
3	IVA	3	3	
4	IVB	6	3	3
Jumlah		11	8	3

Sumber : Sekretariat Kecamatan Comal, 2025

Jumlah pegawai Kecamatan Comal berdasarkan tingkat eselon, yaitu Eselon IIIA sebanyak 1 orang, Eselon IIIB sebanyak 1 orang, Eselon IVA sebanyak 3 orang, Eselon IVB sebanyak 6 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Kecamatan Comal berdasarkan tingkat eselon dominan eselon IVB yaitu sebanyak 54,5 %.

b. Sarana dan Prasarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Kecamatan Comal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5.
Inventaris

Hasil Rekonsiliasi Data BMD

NO.	AKUN NERACA	Saldo Awal	Nilai BMD Periode 30 Juli s.d 30 Agustus 2024		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
A	**ASET LANCAR**				
	A.1 Persediaan	-	-	-	-
B	**ASET TETAP**	**20.436.502.375**	**97.147.000,00**	**-**	**20.533.649.375**
	B.1 Tanah	11.466.205.872	-	-	11.466.205.872
	B.2 Peralatan Dan Mesin	1.469.016.903	97.147.000	-	1.566.163.903
	B.3 Gedung Dan Bangunan	6.638.256.500	-	-	6.638.256.500
	B.4 Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	845.580.600	-	-	845.580.600
	B.5 Aset Tetap lainnya	17.442.500	-	-	17.442.500
	B.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

C	**ASET LAINNYA**	**28.465.000,00**	**-**		**28.465.000,00**
	C.1 Aset Kondisi Rusak Berat	28.465.000	-	-	28.465.000,00
	C.2 Aset Yang Dimanfaatkan Pihak Lain	-	-	-	-
	C.3 Aset Tak Berwujud	-	-	-	-
D	**SUB JUMLAH (A + B + C)**	**20.464.967.375**	**97.147.000,00**	**-**	**20.562.114.375**
E	**Extrakomptable**	**-**	**-**	**-**	**-**
F	**TOTAL (D + E)**	**20.464.967.375**	**97.147.000,00**	**-**	**20.562.114.375**

c. Administrasi Kewilayahan

Terdapat 18 desa/kelurahan di Kecamatan Comal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6.
Administrasi Kewilayahan Kecamatan Comal

No	Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT	Jumlah Perangkat Desa	Jumlah Linmas	Ket
1	Tumbal	4	4	18	11	16	
2	Pecangakan	4	6	35	12	30	
3	Purwosari	7	21	50	14	42	
4	Purwoharjo		9	62		44	
5	Sikayu	4	4	14	13	14	
6	Sidorejo	2	6	30	14	36	
7	Lowa	2	4	9	10	8	
8	Ambokulon	3	3	7	11	10	
9	Gedeg	3	3	9	11	12	
10	Gandu	3	5	15	11	16	
11	Gintung	3	3	17	11	12	
12	Sarwodadi	6	6	33	14	20	
13	Susukan	6	6	26	15	22	
14	Klegen	3	3	17	12	10	
15	Wonokromo	3	6	22	11	18	
16	Kebojongan	3	3	24	11	22	
17	Kandang	2	4	23	10	18	
18	Kauman	2	5	27	12	28	
Jumlah	60	101	439	206	378		

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sumber : Sekretariat Kecamatan Comal, 2025

Kecamatan Comal terdiri dari 17 Desa dan 1 Kelurahan, 439 RT dan 101 RW. Untuk menjaga ketentraman dan ketertiban wilayah, Kecamatan didukung oleh 378 personil Linmas.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Comal

Gambaran kinerja pelayanan Kecamatan Comal Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.7 dan Tabel 2.8 berikut :

Tabel 2.7.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Cakupan layanan masyarakat	%		85,48	87,11	88,22	89,33	90,44	85,48	87,11	88,07	89,32	90,44	100	100	99,83	99,99	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kecamatan	indeks		78	80,70	83	85	90	78	81	80,99	79,31	84,02	100	100,37	97,58	93,31	93,36
3	SAKIP	nilai	-	CC	33	37	40	60	C	34,06	49,60	51,50	60,22	C	103,21	134,05	128,75	100,36
4	Prosentase penyerapan Anggraan	%	-	96	0	0	0	0	99,4	0	0	0	0	103,54	0	0	0	0
4	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	indeks	-	0	33	37	40	42	0	40,69	10,45	0	0	123,30	31,67	0	0	0
5	Prosentase Kelengkapan administrasi desa binaan	%	-	84	0	0	0	0	84	0	0	0	0	100	0	0	0	0
6	Prosentase	%	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id

	meningkatnya kualitas pelayanan publik																
7	Prosentase penanganan pengaduan masyarakat	%	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Persentase pelayanan publik yang tersedia	%	-	74,44	74,44	74,44	74,44	74,44	0	74,44	74,44	74,44	74,44	100	100	100	100	100
9	Persentase Masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%	-	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase gangguan trantibum Tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%	-	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase potensi konflik Tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	-	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase desa bertata Kelola pemerintahan baik	%	-	52,94	61,11	66,67	72,22	77,78	0	61,11	66,67	72,22	77,78	52,94	61,11	66,67	72,22	77,78

Sumber : Kecamatan Comal, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

Semua pelayanan kinerja yang dilakukan oleh Kecamatan Comal hampir dapat mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini didukung adanya komitmen oleh semua pihak dan ketersediaan sarana dan prasarana yang mencukupi.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.8.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	%	100	100,37	97,58	93,31	93,36
2	Cakupan layanan kecamatan	%	100	100	99,83	99,99	100
3	Nilai Sakip	%	C	103,21	134,05	128,75	100,36
4	Persentase pelayanan publik yang tersedia	%	100	100	100	100	100
5	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%	100	100	100	100	100
6	Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100
7	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yangtertangani	%	100	100	100	100	100
8	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	52,94	61,11	66,67	72,22	77,78

Sumber : Kecamatan Comal, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.9.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang

No	Indikator Kinerja	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	362.460	0	0	0	0	362.375	0	0	0	0	99,93	0	0	0	0		
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	379.200	0	0	0	0	379.090	0	0	0	0	99,97	0	0	0	0		
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5.770	0	0	0	0	5.770	0	0	0	0	100	0	0	0	0		
4	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran	63.335	0	0	0	0	63.335	0	0	0	0	100	0	0	0	0		
5	Program pengembangan kewilayahan	60.474	0	0	0	0	60.474	0	0	0	0	100	0	0	0	0		
6	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	0	4.655.443	4.614.739	4.124.892	4.577.130	0	4.511.195	4.204.361	3.763.643	4.133.539	0	96,90	91,11	91,24	90,31		
7	Program penyelenggaraa	0	76.660	49.055	17.89	17.8	0	76.660	49.055	17.890	17.8	0	100	100	100	100		

https://jdih.pemalangkab.go.id

	n pemerintahan dan pelayanan publik				0	90					90						
8	Program pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	0	92.365	231.343	393.072	416.367	0	92.361	230.871	392.192	416.367	0	99,99	99,80	99,77	100	
9	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	0	0	16.000	10.000	103.600	0	0	16.000	9.999	103.600	0	100	100	100	100	
10	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	0	51.610.	85.046	51.000	79.865	0	51.610	85.046	51.000	79.865	0	100	100	100	100	
11	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	0	282.661	40.000	28.000	28.000	0	282.659	40.000	28.000	28.000	0	100	100	100	100	

Sumber : Kecamatan Comal, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Comal

Kecamatan Comal dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Comal tahun 2025-2029, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Comal adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan;
4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa dan kecamatan;
5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Comal adalah sebagai berikut:

1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya Perangkat Daerah dan Pendamping Desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa;
3. Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan;
4. Adanya Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa dan kecamatan;
5. Adanya Perangkat Daerah dan Pendamping Desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Comal

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan,Kecamatan Comal sebagai PD mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Comal dapat dilihat dalam tabel 2.11 berikut :

Tabel 2.10.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Comal

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia	Masih terbatasnya jenis data pemerintahan yang dipublikasi	Masih terbatasnya data pemerintahan yang tersedia
		Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat	Belum tersedianya SOP pelayanan yang sesuai kebutuhan
			Masih kurangnya peran Kecamatan dalam pencapaian SPM
		Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat	Masih terdapat ketidaksesuaian data masyarakat miskin
2	Masih rendahnya peran serta masyarakat desa	Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Masih rendahnya tingkat partisipasi musrenbang desa
			Masih rendahnya tingkat partisipasi Musrenbang Kecamatan
			Belum optimalnya pendampingan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten
		Belum optimalnya peran serta lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Masih rendahnya sarana prasarana yang dimiliki lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan
			Masih rendahnya kapasitas pengelola lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan
3	Belum optimalnya penanganan gangguan	Masih rendahnya linmas yang mempunyai kompetensi	Belum optimalnya koordinasi dengan Polsek dan Koramil
			Masih terbatasnya Linmas yang

https://jdih.pemalangkab.go.id

	ketentraman dan ketertiban umum		mengikuti pelatihan
		Belum optimalnya koordinasi penegakkan Perda/Perbup	Belum optimalnya koordinasi monitoring penegakkan Perda/Perbup
4	Masih terjadi potensi konflik di tingkat desa dan kecamatan	Masih banyak masyarakat yang belum paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Belum optimalnya peringatan hari besar nasional dan hari besar agama sebagai upaya menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
			Masih minimnya pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di tingkat desa dan kecamatan
			Belum optimalnya penanganan potensi konflik sosial
			Perlu ditingkatkannya koordinasi antar pimpinan di Kecamatan
5	Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait tata kelola pemerintahan desa	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Masih banyak desa yang belum mampu menyusun Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
			Masih banyak desa yang belum mampu melaksanakan administrasi tata pemerintahan desa dengan tertib
			Masih banyak desa yang belum mampu mengelola keuangan desa dan mendayagunakan aset desa
			Belum optimalnya pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa
			Ada desa yang mengadakan pemilihan kepala desa
			Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
			Ada desa yang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
			Belum optimalnya fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
			Belum optimalnya fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
			Belum optimalnya fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa

Pengarusutamaan gender diterapkan oleh Kecamatan Comal pada kegiatan Musrenbang Kecamatan, dimana perwakilan kelompok perempuan menjadi salah satu komponen peserta. Pengarusutamaan gender diterapkan juga dalam fasilitasi lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yaitu fasilitasi kepada PKK dan Posyandu.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.6. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Penelaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Comal yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah :

"PEMALANG BERCAHAYA - BERSIH CAKAP HANDAL, MULYA"

Visi ini memiliki pembentuk kata :

1. **Bersih :** Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan
2. **Cakap :** dimaknai memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
3. **Handal :** dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang Tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.
4. **MULYA** : Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan local sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi Masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dalam rangka mencapai visi diatas berikut ini Misi RPJMD 2025-2029 berdasarkan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yaitu:

1. **Misi 1 Resik** : menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih. Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik
2. **Misi 2 Hijau** : meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sektor unggulan, Pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau, yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan) yang ramah lingkungan, industri hijau Dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM dimasyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.
3. **Misi 3 Apik** : meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penaatan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dari Desa
4. **Misi 4 Peduli** : meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan Masyarakat. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi
5. **Misi 5 Silaturahmi** : meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan Sejahtera. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, dan saling menghormati dan teposliro
6. **Misi 6 Organisatoris** : meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan *Good Governance, Clean Governance* dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.

https://jdih.pemalangkab.go.id

7. **Misi 7 Digitalisasi** : memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas Masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi
8. **Misi 8 Ikhlas** : menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkan kearifan dan budaya lokal.

Sesuai dengan Misi Bupati Pemalang di atas, maka Kecamatan Comal mendukung misi Bupati tersebut yaitu **Misi Ke 6 (Organisatoris : meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi.**
Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan *Good Governance, Clean Governance* dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik).

Sedangkan untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 tersebut ditetapkan 12 (dua belas) program prioritas, yaitu :

1. Seragam sekolah dan LKS Gratis
2. Jalan halus merata
3. Revitalisasi penyediaan air bersih dari hulu sampai hilir
4. Penyediaan lapangan kerja melalui program padat karya
5. Bantuan modal usaha untuk UMKM
6. Wifi gratis tiap desa
7. Satu ambulance, satu desa
8. Jaminan ketersediaan bibit unggul dan pupuk murah
9. Bantuan kendaraan operasional pondok pesantren
10. Insentif untuk guru honorer, TPQ, Madin dan Marbot
11. Santuan kematian Rp. 3.000.000,-
12. Pembukaan pintu tol sewaka

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dimana tujuan dari Kecamatan Comal adalah **Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan**, sesuai dengan tujuan Bupati yang ke **6 (enam) yaitu meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi.**

Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Sasaran pembangunan jangka menengah adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1 Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih sehat dan nyaman dengan sasarannya : Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan serta pengelolaan sampah
2. Tujuan 2 Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel dengan sasaran sebagai berikut : Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik
3. Tujuan 3 Meningkatkan daya saing pembangunan daerah dengan sasaran sebagai berikut :
   a. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi lokal
   b. Meningkatnya kualitas SDM daerah
   c. Meningkatnya kemandirian pangan
   d. Meningkatnya pengendalian harga bahan pokok dan penting
   e. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata
   f. Meningkatnya kualitas pembangunan desa dan Kawasan perdesaan
   g. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender
   h. Meningkatnya kualitas riset dan inovasi
4. Tujuan 4 Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dengan sasaran sebagai berikut :
   a. Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat
   b. Meningkatnya penanganan pengangguran
5. Tujuan 5 Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, yang menciptakan keamanan dengan nilai nilai budaya dan kegotong-royongan dengan sasaran sebagai berikut :
   a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hidup berdampingan secara harmonis dan kondusif

https://jdih.pemalangkab.go.id

b. Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana

c. Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal

Berdasarkan sasaran RPJMD 2025-2029 diatas maka Kecamatan Comal mempunyai 2 (dua) sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan
2. Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan

Uraian mengenai telaah visi, misi dan program prioritas Bupati dapat dilihat pada tabel 2.12. berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.11.
Telaah Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati

Misi/Program Prioritas	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
Visi : "PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA"				
Misi 6 : Meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi	1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1. Masih terbatasnya pelayanan kepada masyarkat	1. Ruang pelayanan belum memadai 2. Belum memiliki petugas pelayanan yang berstatus PNS 3. Petugas pelayanan belum memiliki sertifikat yang berkaitan dengan pelayanan	1. Perlu adanya peran pimpinan agar ruang pelayanan lebih memadai dengan memasukkan pada rencana anggaran kecamatan 2. Membuat usulan permintaan Tenaga PNS kepada BKD Kab.Pemalang 3. Memberi kesempatan kepada petugas pelayanan yang ada untuk mengikuti bimbingan teknis maupun studi banding ke kecamatan lain mapun OPD di sekitar Kab.Pemalang terkait pelayanan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Misi/Program Prioritas	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
				publik
	2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan	Perlu adanya dukungan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang lebih optimal dari Kecamatan dan Pendamping Desa
	3. Penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Belum optimalnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	Peran Linmas yang ada di desa/kelurahan lebih dimaksimalkan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan desa/kelurahan
	4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Masih terjadi potensi konflik ditingkat desa dan kecamatan	Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap kondisi di lingkungan sekitar desa/kelurahan dan kecamatan	Adanya FKDM dan Forkompimcam yang siap menangani potensi konfilik ditingkat desa/kelurahan dan kecamatan
	5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Masih rendahnya desa terkait tata kelola pemerintahan desa	Masih rendahnya kemampuan/kapasitas dari aparatur	Adanya pendamping desa yang mendukung pembinaan dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Misi/Program Prioritas	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
			desa/kelurahan dalam tata keloloa pemerintahan	pengawasan pemerintah desa
	6. Penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Masih rendahnya nilai SAKIP yang diperoleh	Masih perlu adanya perbaikan serta komitmen dalam manajemen kinerja pada kecamatan	Perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan implementasi SAKIP

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.7 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam melaksanakan pelayanan, yang menjadi sasaran layanan adalah masyarakat secara umum, lembaga kemasyarakan dan desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Comal.

2.8. Mitra Kecamatan Comal

Untuk terciptanya harmonisasi hubungan dengan lembaga vertikal dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Comal, yang menjadi mitra adalah Kepolisian Sektor Comal, Komando Rayon Militer Comal serta Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Comal.

2.9. Perumusan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan, pada tabel berikut dirumuskan sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.12.
Isu Strategis Kecamatan Comal

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	1. Menurunnya IRB 2. Masih rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan 3. Belum optimalnya penataan desa 4. Belum optimalnya data statistik yang dimiliki 5. Masih kurangnya Tingkat keamanan informasi pemerintahan 6. Kurangnya pelestarian warisan budaya 7. Belum optimalnya sarana dan prasarana perpustakaan 8. Belum optimalnya koordinasi antar bidang 9. Belum optimalnya dukungan untuk	Belum optimalnya budaya e-government	1. Krisis utang 2. Cyber Security	1. Tata kelola pemerintahan belum optimal 2. Kepastian dan Penegakan hukum masih lemah 3. Demokratisasi belum optimal	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Reformasi tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi

https://jdih.pemalangkab.go.id

	pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan kurangnya kualitas SDM yang sesuai kompetensinya 10. Belum optimalnya kualitas SDM dan perencanaannya 11. Masih rendahnya PAD pajak daerah yang diterima namun angka belanja daerah tinggi 12. Belum maksimalnya administrasi kepegawaian 13. Masih kurangnya pemandaatan hasil penelitian dan pengembangan 14. Belum optimalnya Penyelenggaraan pengawasan 15. Belum optimalnya pelayaan publik dan masih kurangnya SDM yang kompeten 16. Rasio belanja pegawai					

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Comal

Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang pelayanan publik, maka Kecamatan Comal harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Kecamatan Comal secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan tingkat desa dan kecamatan, serta masyarakat secara umum.

3.1.1 Sasaran

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Comal dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Comal selama tahun 2025-2029, adalah **“Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat”** dengan indikatornya : Nilai SKM dan Prosentase meningkatnya jumlah Desa Mandiri.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Comal dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam berikut ini :

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Comal

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Definisi Operasional	Target Capaian						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan		Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan	3	2	2	2	2	3	
2.		Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyara	Nilai SKM	Nilai	Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang	84,50	85	85,50	86,23	86,50	87,15	
			Prosentase meningkatnya jumlah Desa Mandiri	%	Jumlah desa mandiri dibagi jumlah seluruh desa di kecamatan	17,65	29,41	41,17	52,93	64,69	82,34	

https://jdih.pemalangkab.go.id

					x 100%							
	SEBARAN INDIKATOR PROGRAM											
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas penyeelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	%	Jumlah kewenangan yang dilaksanakan dibagi seluruh kewenangan yang dilimpahkan x 100%	100	100	100	100	100	100	
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	%	Jumlah Desa / Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif dibagi jumlah seluruh desa x100%	100	100	100	100	100	100	
			Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan)	%	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik dibagi total sarana prasana kelurahan x100%	68,12	75,50	80,87	87,25	93,62	100	
5.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	%	Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani dibagi Jumlah gangguan x 100%	100	100	100	100	100	100	

https://jdih.pemalangkab.go.id

6.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	%	Jumlah konflik yang ditangani dibagi jumlah konflik yang munculx 100%	100	100	100	100	100	100	
7.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase kesesuaian RKPDes dan RPJMDes dengan RPJMD	%	Jumlah Desa dengan RKPDes dan RPJMDes sesuai dengan RPJMD dibagi jumlah desa x 100%	100	100	100	100	100	100	

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara yang diambil oleh Kecamatan Comal guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan dapat dirangkum pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.
Tujuan,Sasaran,Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Comal

Visi : Pemalang Bercahaya (Bersih, Cakap, Handal, Mulya)						
Misi 6 : Organisatoris (Meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi)						
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan					

https://jdih.pemalangkab.go.id

	ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan					
		Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	1. Meningkatkan pelayanan publik sesuai SOP 2. Menyediakan sarana dan prasarana untuk menampung usulan/aspirasi masyarakat demi peningkatan kinerja	1.1. Mengimplementasikan SOP 1.2. Mewujudkan pelayanan berbasis digital, mudah dan murah 2.1 Mewujudkan pembangunan desa mandiri dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pengembangan Kawasan perdesaan penguatan kelembagaan desa dan mendorong berkembangnya BUMDes dalam rangka meningkatkan perekonomian desa 3.1. Mewujudkan peningkatan	1.1 Menerapkan Standar Pelayanan sesuai SOP 1.2 Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem digital yang efisien 2.1 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan BUMDes	

https://jdih.pemalangkab.go.id

			3. Meningkatkan kondisi yang ketentraman dan ketertiban wilayah	harmonisasi kehidupan, mengurangi potensi konflik, mendorong demokratisasi dan peningkatan kondusivitas wilayah 3.2. Peningkatkan mitigasi bencana, kesiap siagaan bencana	3.1. Pendekatan mediasi dan dialog, pendidikan dan pelatihan tentang toleransi	
			4. Meningkatkan penanganan konflik	4.1. Peningkatan harmonisasi kehidupan, mengurangi potensi konflik, mendorong demokratisasi dan peningkatan kondusivitas wilayah	3.2. Melakukan simulasi evakuasi, membuat rencana penyelamatan diri 4.1 Membangun sistem peringatan dini dan memelihara kondisi damai	
			5. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	5.1. Peningkatan pembangunan desa mandiri dan Mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pengembangan Kawasan perdesaan penguatan kelembagaan desa dan mendorong berkembangnya BUMDes dalam rangka meningkatkan perekonomian desa.	5.1. Melakukan pemantauan pembangunan desa	

https://jdih.pemalangkab.go.id

		Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan	1. Meningkatkan nilai SAKIP dan IRB	1.1. Peningkatan akuntabilitas pembangunan melalui peningkatan kualitas perencanaan, kinerja dan pelaporan. 1.2. Peningkatan maturitas system pengendalian intern melalui peningkatan komitmen pemerintah dalam menjalankan pembangunan, penguatan kebijakan dan regulasi, peningkatan kapabilitas APIP, peningkatan kualitas dan profesionalisme pegawai, penguatan manajemen resiko, digitalisasi, serta evaluasi berkelanjutan	1.1. Peningkatan perencanaan dan evaluasi kinerja 1.2. Peningkatan akuntabilitas kinerja 1.3. Penguatan kapasitas SDM 1.4. Pengutan komitmen SDM	

3.3 Arah Kebijakan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Penahapan pembangunan Kecamatan Comal adalah prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Comal, Penahapan Renstra Kecamatan Comal dapat disajikan pada tabel di bawah ini

Tabel 3.3.
Penahapan Renstra Kecamatan Comal

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Memperkuat digitalisasi dalam memberikan pelayanan pemerintahan	Meningkatkan infrastruktur di Desa / Kelurahan (peningkatan infrastruktur jalan dan selokan)	Penguatan Pemberdayaan Masyarakat melalui pelatihan ketrampilan untuk mendukung UMKM	Mempercepat pembangunan Kecamatan Comal untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat	Peningkatan Keamanan dan ketertiban umum

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategis yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025 – 2030 memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Comal adalah sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.4.
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Comal

NO	OPERASIONALISASI NPSK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN COMAL	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum	Peningkatan kualitas perencanaan daerah di fokuskan pada transparansi, akuntabilitas perencanaan, dan sinergitas dok pusat dan propinsi Peningkatan kualitas digitalisai pelayanan pemerintahan di fokuskan pada peningkatan tata kelola arsitektur SPBE, mendorong kualitas SMART City dan kualitas layanan aduan Peningkatan kualitas pelayanan publik di fokuskan pada pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan kepuasan pada masyarakat	Penguatan sistem perencanaan, pelayananan pemerintahan dan pengukuran kinerja	
2	Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Pengembangan industri kecil menengah dengan penguatan sentra/kluster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital	Pengembangan pelatihan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan UMKM	
3	Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan konduktivitas wilayah dengan peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama dan pemahaman wawasan kebangsaan	Meningkatkan pelatihan limas dan pembinaan masyarakat terkait dengan sistem pengaduan maupun keamanan dan ketertiban	
4	Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa di fokuskan pada peningkatan kualitas eprocurements, kualitas sarana dan prasarana	Penguatan koordinasi dan supervisi dar	
5	Membina dan Mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan / atau kelurahan	Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan difokuskan pada peningktan indeks desa, peningkatan peran BUMDes dalam pembangunan daerah, peningkatan pembinaan dan	Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/kelurahan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	OPERASIONALISASI NPSK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN COMAL	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		pengawasan kecamatan dalam pembangunan desa/kelurahan dan pengembangan kerjasama antar dan pengembangan kerjasama antar desa		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB.KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, kegiatan dan Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program ini diarahkan untuk peningkatan capaian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

   1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
      1). Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2). Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      3). Sub.Kegiatan Koordinasib dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      4). Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      5). Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      6). Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      7). Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1). Sub.Kegiatan Penyusunan Gaji dan Tunjangan ASN
      2). Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

https://jdih.pemalangkab.go.id

3).Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   1).Sub.Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
   2).Sub.Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1).Sub.Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2). Sub.Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   3). Sub.Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   4).Sub.Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   5).Sub.Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   6). Sub.Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1). Sub.Kegiatan Pengadaan Mebel
   2). Sub.Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1). Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2). Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   3). Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1). Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
   2). Sub.Kegiatan Pemeliharaan mebel
   3). Sub.Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
   4).Sub.Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
   5).Sub.Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

https://jdih.pemalangkab.go.id

Program ini diarahkan pada peningkatan capaian persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun dengan fokus kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

8. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintan di Tingkat Kecamatan
   1). Sub.Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
   1).Sub.Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan
   2).Sub.Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
   3).Sub.Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
10. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
   1).Sub.Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha
   2).Sub.Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan pada peningkatan capaian persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif dan persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik dengan fokus kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

11. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   1). Sub.Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa
   2). Sub.Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan di Desa

   Sub.Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
12. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
   1). Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan
   2). Sub Kegiatan pemabgunan sarana dan prasarana kelurahan

https://jdih.pemalangkab.go.id

3). Sub Kegiatan pemberdayaan masarakat di kelurahan

4. Program Koordinasi dan Ketentraman Umum

Program ini diarahkan pada peningkatan capaian persenatse gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani dengan fokus kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

13. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Umum
    1). Sub.Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentra Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
14. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah
    1). Sub.Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya diBidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada peningkatan capaian persentase konflik di masyarakat yang ditangani dengan fokus kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

15. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
    1). Sub.Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahana Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian hineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
    2). Sub.Kegiatan Penanganan Konflik, Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
    3). Sub.Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Program ini diarahkan pada peningkatan capaian persentase kesesuaian RKPDes dan RPJMDes dengan RPJMD dengan fokus kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

16. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    1). Sub.Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

https://jdih.pemalangkab.go.id

2). Sub.Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahana Desa

3). Sub.Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

4). Sub.Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

5). Sub.Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa

6). Sub.Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Daerah

7). Sub.Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Rencana Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran Rencana Program,Kegiatan, Sub.Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk Kecamatan Comal selama lima tahun 2025- 2029 dapat diliat pada

Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

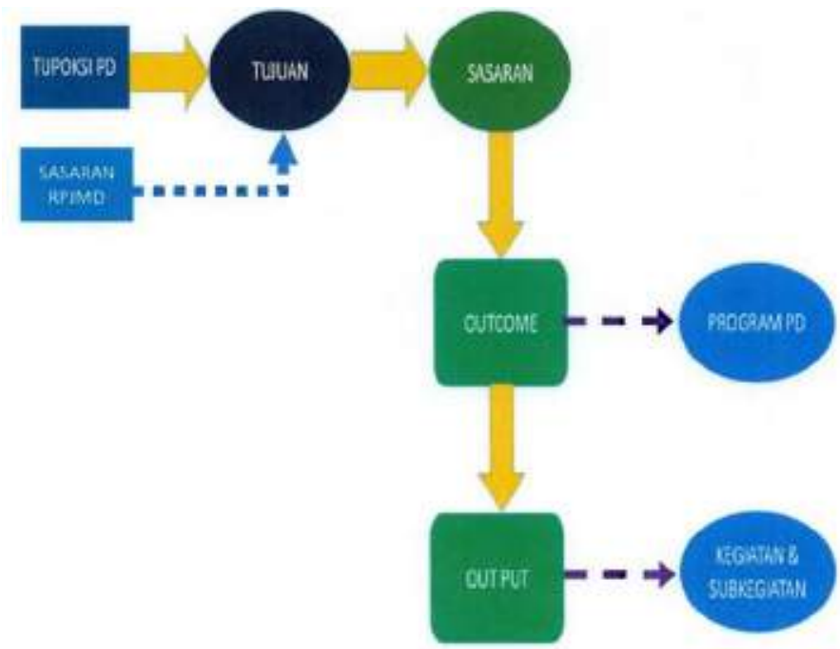

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Comal menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanan Kecamatan Comal. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Kecamatan Comal serta teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Comal seperti Tabel berikut

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntable, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan				Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan (Desa/Kelurahan)		
		Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat			Nilai SKM (Nilai)		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Prosentase meningkatnya jumlah Desa Mandiri		
			Meningkatnya kinerja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah		**Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai)**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
				Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan (%)	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (Dokumen)**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Dokumen RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel (%)	**Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan yang tersusun (Dokumen)**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	
				Persentase dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang akuntabel (%)	**Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang tersusun (Dokumen)**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	
						Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	
						Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	
				Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	**Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersedia (Paket, Dokumen, Dan Laporan)**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
						Penyediaan Komponen	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	
				Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	**Jumlah barang milik daerah yang tersedia (Unit)**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Persentase ketersediaan	**Jumlah laporan**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				laporan penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	**penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia (Laporan)**	**Pemerintahan Daerah**	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	**Jumlah barang milik daerah yang terpelihara (Unit)**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Pemeliharaan Mebel	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas penyeelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	
				Persentase dokumen koordinasi penyelenggara	**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggara**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				an kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang menunjang pelaksanaan tugas (%)	**an kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (Dokumen)**		
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
						Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
						Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di Wilayah Kecamatan	
						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Persentase	**Jumlah**	**Pelaksanaan Urusan**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang menunjang pelaksanaan tugas (%)	**laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat (Laporan)**	**Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	
						Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perijinan non usaha	
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	
					Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)		
				Persentase jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang menunjang pelaksanaan tugas (%)	**Jumlah laporan koordinasi kegiatan Pemberdayaan desa yang tersusun (Laporan)**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	
						Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	
						Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Persentase	**Jumlah**	**Kegiatan Pemberdayaan**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				kegiatan pemberdayaan di kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan (%)	**kegiatan pemberdayaan di kelurahan (Kegiatan)**	**Kelurahan**	
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum		**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	
				Persentase laporan koordinasi upaya penyelenggaraan	**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				ketentraman dan ketertiban umum yang menunjang pelaksanaan tugas (%)	**ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun (Laporan)**		
						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang menunjang pelaksanaan tugas (%)	**Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tersusun (Laporan)**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	
						Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						tugas dan fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama		**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	
				persentase Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang menunjang pelaksanaan tugas (%)	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Dokumen)**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	
						Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
						Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa		**Persentase kesesuaian RKPDes dan RPJMDes dengan RPJMD (%)**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	
				Persentase Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi	**Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang menunjang pelaksanaan tugas (%)	**dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun (Dokumen)**		
						Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
						Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
						Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
						Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Daerah dengan Pembangunan Desa	
						Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	

4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Rincian target kinerja dan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dari kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2030 adalah sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET. 2026 TARGET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa/kelurahan mandiri di kecamatan (Desa/Kelurahan)	3	3		4		4		4		4		
Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Nilai SKM (Nilai)	84,02	85,00		85,50		86,23		86,50		87,15		
	Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri (%)	17,65	17,65		23,53		23,53		23,53		23,53		
UNSUR KEWILAYAHAN				5.156.729.000		5.156.729.000		5.156.729.000		5.156.729.000		5.156.729.000	Kecamatan Comal
Kecamatan Comal				4.659.788.970		4.659.788.970		4.659.788.970		4.659.788.970		4.659.788.970	Kecamatan Comal
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai)	60,22	60,55	4.439.475.770	61,00	4.439.475.770	61,50	4.439.475.770	61,55	4.439.475.770	62,00	4.439.475.770	Kecamatan Comal

https://jdih.pemalangkab.go.id

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (Dokumen)**	**20**	**20**	**32.667.000**	**20**	**32.667.000**	**20**	**32.667.000**	**20**	**32.667.000**	**20**	**32.667.000**	**Kecamatan Comal**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	2	2	**5.221.000**	2	**5.221.000**	2	**5.221.000**	2	**5.221.000**	2	**5.221.000**	**Kecamatan Comal**
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	**1**	**3.754.800**	**1**	**3.754.800**	**1**	**3.754.800**	**1**	**3.754.800**	**1**	**3.754.800**	**Kecamatan Comal**
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	**1**	**3.719.600**	**1**	**3.719.600**	**1**	**3.719.600**	**1**	**3.719.600**	**1**	**3.719.600**	**Kecamatan Comal**
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	**1**	**5.706.900**	**1**	**5.706.900**	**1**	**5.706.900**	**1**	**5.706.900**	**1**	**5.706.900**	**Kecamatan Comal**
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	**1**	**4.287.300**	**1**	**4.287.300**	**1**	**4.287.300**	**1**	**4.287.300**	**1**	**4.287.300**	**Kecamatan Comal**

https://jdih.pemalangkab.go.id

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	12	**12**	**6.089.300**	**12**	**6.089.300**	**12**	**6.089.300**	**12**	**6.089.300**	**12**	**6.089.300**	**Kecamatan Comal**
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)	2	**2**	**3.888.100**	**2**	**3.888.100**	**2**	**3.888.100**	**2**	**3.888.100**	**2**	**3.888.100**	**Kecamatan Comal**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan yang tersusun (Dokumen)**	25	25	**3.848.909.750**	25	**3.848.909.750**	25	**3.848.909.750**	25	**3.848.909.750**	25	**3.848.909.750**	**Kecamatan Comal**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)	14	12	3.842.729.000	12	3.842.729.000	12	3.842.729.000	12	3.842.729.000	12	3.842.729.000	**Kecamatan Comal**
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	1	2.982.100	1	2.982.100	1	2.982.100	1	2.982.100	1	2.982.100	**Kecamatan Comal**
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	12	12	3.198.650	12	3.198.650	12	3.198.650	12	3.198.650	12	3.198.650	**Kecamatan Comal**

https://jdih.pemalangkab.go.id

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang tersusun (Dokumen)**	3	**3**	**4.000.000**	**3**	**4.000.000**	**3**	**4.000.000**	**3**	**4.000.000**	**3**	**4.000.000**	**Kecamatan Comal**
Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	**Kecamatan Comal**
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	2	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	**Kecamatan Comal**
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersedia (Paket, Dokumen, Dan Laporan)**	**85**	**85**	**177.280.220**	**85**	**177.280.220**	**85**	**177.280.220**	**85**	**177.280.220**	**85**	**177.280.220**	**Kecamatan Comal**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	12	12	4.521.100	12	4.521.100	12	4.521.100	12	4.521.100	12	4.521.100	**Kecamatan Comal**
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12	12	129.801.220	12	129.801.220	12	129.801.220	12	129.801.220	12	129.801.220	**Kecamatan Comal**
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12	12	5.040.400	12	5.040.400	12	5.040.400	12	5.040.400	12	5.040.400	**Kecamatan Comal**
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	24	24	4.500.000	24	4.500.000	24	4.500.000	24	4.500.000	24	4.500.000	**Kecamatan Comal**

https://jdih.pemalangkab.go.id

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	24	24	31.418.000	24	31.418.000	24	31.418.000	24	31.418.000	24	31.418.000	**Kecamatan Comal**
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	1.999.500	1	1.999.500	1	1.999.500	1	1.999.500	1	1.999.500	**Kecamatan Comal**
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah barang milik daerah yang tersedia (Unit)**	28	6	**86.075.000**	6	**86.075.000**	6	**86.075.000**	6	**86.075.000**	6	**86.075.000**	**Kecamatan Comal**
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	22	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	**Kecamatan Comal**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	6	4	71.075.000	4	71.075.000	4	71.075.000	4	71.075.000	4	71.075.000	**Kecamatan Comal**
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia (Laporan)**	**36**	**36**	**177.963.800**	**36**	**177.963.800**	**36**	**177.963.800**	**36**	**177.963.800**	**36**	**177.963.800**	**Kecamatan Comal**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	12	12	4.799.800	12	4.799.800	12	4.799.800	12	4.799.800	12	4.799.800	**Kecamatan Comal**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	29.845.000	12	29.845.000	12	29.845.000	12	29.845.000	12	29.845.000	**Kecamatan Comal**
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	143.319.000	12	143.319.000	12	143.319.000	12	143.319.000	12	143.319.000	**Kecamatan Comal**
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah barang milik daerah yang terpelihara (Unit)**	**29**	29	**112.580.000**	29	**112.580.000**	29	**112.580.000**	29	**112.580.000**	29	**112.580.000**	**Kecamatan Comal**

https://jdih.pemalangkab.go.id

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14	14	43.130.000	14	43.130.000	14	43.130.000	14	43.130.000	14	43.130.000	**Kecamatan Comal**
Pemeliharaan Mebel	jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	**Kecamatan Comal**
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10	15.425.000	10	15.425.000	10	15.425.000	10	15.425.000	10	15.425.000	**Kecamatan Comal**
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	1	7.275.000	1	7.275.000	1	7.275.000	1	7.275.000	1	7.275.000	**Kecamatan Comal**
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2	44.250.000	2	44.250.000	2	44.250.000	2	44.250.000	2	44.250.000	**Kecamatan Comal**
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**	74,44	100	17.890.000	100	17.890.000	100	17.890.000	100	17.890.000	100	17.890.000	**Kecamatan Comal**
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (Dokumen)**	**1**	**2**	**5.390.000**	**2**	**5.390.000**	**2**	**5.390.000**	**2**	**5.390.000**	**2**	**5.390.000**	**Kecamatan Comal**

https://jdih.pemalangkab.go.id

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	2	**5.390.000**	2	**5.390.000**	2	**5.390.000**	2	**5.390.000**	2	**5.390.000**	**Kecamatan Comal**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan yang tersusun (Laporan)**	4	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000	**Kecamatan Comal**
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	1	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	**Kecamatan Comal**
Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	**Kecamatan Comal**
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	**Kecamatan Comal**

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat (Laporan)**	112	112	5.000.000	112	5.000.000	112	5.000.000	112	5.000.000	112	5.000.000	**Kecamatan Comal**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	100	100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000	**Kecamatan Comal**
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan	12	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	**Kecamatan Comal**
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**	100	100	73.235.000	100	73.235.000	100	73.235.000	100	73.235.000	100	73.235.000	**Kecamatan Comal**
	Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)	61,75	69,40		69,40		69,40						**Kecamatan Comal**
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah laporan koordinasi kegiatan Pemberdayaan desa yang tersusun (Laporan)**	19	19	73.235.000	19	73.235.000	19	73.235.000	19	73.235.000	19	73.235.000	**Kecamatan Comal**
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	6	6	8.735.000	6	8.735.000	6	8.735.000	6	8.735.000	6	8.735.000	**Kecamatan Comal**

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	1	1	34.000.000	1	34.000.000	1	34.000.000	1	34.000.000	1	34.000.000	**Kecamatan Comal**
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	30.500.000	12	30.500.000	12	30.500.000	12	30.500.000	12	30.500.000	**Kecamatan Comal**
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)**	100	100	10.022.400	100	10.022.400	100	10.022.400	100	10.022.400	100	10.022.400	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun (Laporan)**	1	1	5.022.600	1	5.022.600	1	5.022.600	1	5.022.600	1	5.022.600	**Kecamatan Comal**
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	5.022.600	1	5.022.600	1	5.022.600	1	5.022.600	1	5.022.600	**Kecamatan Comal**

https://jdih.pemalangkab.go.id

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tersusun (Laporan)**	1	1	4.999.900	1	4.999.900	1	4.999.900	1	4.999.900	1	4.999.900	**Kecamatan Comal**
Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	1	1	4.999.800	1	4.999.800	1	4.999.800	1	4.999.800	1	4.999.800	**Kecamatan Comal**
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)**	100	**100**	**87.665.800**	**100**	**87.665.800**	**100**	**87.665.800**	**100**	**87.665.800**	**100**	**87.665.800**	**Kecamatan Comal**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Dokumen)**	214	214	87.665.800	214	87.665.800	214	87.665.800	214	87.665.800	214	87.665.800	**Kecamatan Comal**

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	200	200	61.666.000	200	61.666.000	200	61.666.000	200	61.666.000	200	61.666.000	**Kecamatan Comal**
Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	2	2	1.999.800	2	1.999.800	2	1.999.800	2	1.999.800	2	1.999.800	**Kecamatan Comal**
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	**Kecamatan Comal**
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase kesesuaian RKPDes dan RPJMDes dengan RPJMD (%)**	77,78	100	47.500.000	100	47.500.000	100	47.500.000	100	47.500.000	100	47.500.000	**Kecamatan Comal**

https://jdih.pemalangkab.go.id

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun (Dokumen)**	11	11	47.500.000	11	47.500.000	11	47.500.000	11	47.500.000	11	47.500.000	**Kecamatan Comal**
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	2	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	**Kecamatan Comal**
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	**Kecamatan Comal**
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	**Kecamatan Comal**
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	**Kecamatan Comal**
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	16	16.000.000	16	16.000.000	16	16.000.000	16	16.000.000	16	16.000.000	**Kecamatan Comal**

https://jdih.pemalangkab.go.id

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	**Kecamatan Comal**
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	2	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	**Kecamatan Comal**
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	2	2	3.500.000	2	3.500.000	2	3.500.000	2	3.500.000	2	3.500.000	**Kecamatan Comal**
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	**Kecamatan Comal**
KELURAHAN PURWOHARJO				**480.940.030**		**480.940.030**		**480.940.030**		**480.940.030**		**480.940.030**	Kelurahan Purwoharjo
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai)**	60,22	60,55	**211.257.830**	61,00	**211.257.830**	61,50	**211.257.830**	61,55	**211.257.830**	62,00	**211.257.830**	**Kelurahan Purwoharjo**
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersedia (Paket, Dokumen, Dan Laporan)**	60	60	**85.926.330**	60	**85.926.330**	60	**85.926.330**	60	**85.926.330**	60	**85.926.330**	**Kelurahan Purwoharjo**

https://jdih.pemalangkab.go.id

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	12	12	2.878.000	12	2.878.000	12	2.878.000	12	2.878.000	12	2.878.000	**Kelurahan Purwoharjo**
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12	12	70.651.000	12	70.651.000	12	70.651.000	12	70.651.000	12	70.651.000	**Kelurahan Purwoharjo**
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12	12	3.797.330	12	3.797.330	12	3.797.330	12	3.797.330	12	3.797.330	**Kelurahan Purwoharjo**
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	2.600.000	12	2.600.000	12	2.600.000	12	2.600.000	12	2.600.000	**Kelurahan Purwoharjo**
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	**Kelurahan Purwoharjo**
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah barang milik daerah yang tersedia (Unit)**	1	**7**	**12.675.000**	**7**	**12.675.000**	**7**	**12.675.000**	**7**	**12.675.000**	**7**	**12.675.000**	**Kelurahan Purwoharjo**
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	6	3.000.000	6	3.000.000	6	3.000.000	6	3.000.000	6	3.000.000	**Kelurahan Purwoharjo**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	1	1	9.675.000	1	9.675.000	1	9.675.000	1	9.675.000	1	9.675.000	**Kelurahan Purwoharjo**
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia (Laporan)**	36	**36**	**89.026.000**	**36**	**89.026.000**	**36**	**89.026.000**	**36**	**89.026.000**	**36**	**89.026.000**	**Kelurahan Purwoharjo**

https://jdih.pemalangkab.go.id

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	12	12	6.450.000	12	6.450.000	12	6.450.000	12	6.450.000	12	6.450.000	**Kelurahan Purwoharjo**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	19.084.000	12	19.084.000	12	19.084.000	12	19.084.000	12	19.084.000	**Kelurahan Purwoharjo**
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	63.492.000	12	63.492.000	12	63.492.000	12	63.492.000	12	63.492.000	**Kelurahan Purwoharjo**
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah barang milik daerah yang terpelihara (Unit)**	11	12	**23.630.500**	12	**23.630.500**	12	**23.630.500**	12	**23.630.500**	12	**23.630.500**	Kelurahan Purwoharjo
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipleihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	4	7.787.500	4	7.787.500	4	7.787.500	4	7.787.500	4	7.787.500	Kelurahan Purwoharjo
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7	7	4.300.000	7	4.300.000	7	4.300.000	7	4.300.000	7	4.300.000	Kelurahan Purwoharjo
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	11.543.000	1	11.543.000	1	11.543.000	1	11.543.000	1	11.543.000	Kelurahan Purwoharjo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**	100	100	**266.132.200**		**266.132.200**		**266.132.200**		**266.132.200**		**266.132.200**	Kelurahan Purwoharjo

https://jdih.pemalangkab.go.id

	Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)												Kelurahan Purwoharjo
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah kegiatan pemberdayaan di kelurahan (Kegiatan)**	12	12	**266.132.200**	12	**266.132.200**	12	**266.132.200**	12	**266.132.200**	12	**266.132.200**	Kelurahan Purwoharjo
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	5	5	12.948.200	5	12.948.200	5	12.948.200	5	12.948.200	5	12.948.200	Kelurahan Purwoharjo
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Kelurahan Purwoharjo
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	6	6	153.184.000	6	153.184.000	6	153.184.000	6	153.184.000	6	153.184.000	Kelurahan Purwoharjo
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)**	100	100	3.550.000	100	3.550.000	100	3.550.000	100	3.550.000	100	3.550.000	Kelurahan Purwoharjo
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Dokumen)**	384	384	3.550.000	384	3.550.000	384	3.550.000	384	3.550.000	384	3.550.000	Kelurahan Purwoharjo

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	384	384	3.550.000	384	3.550.000	384	3.550.000	384	3.550.000	384	3.550.000	Kelurahan Purwoharjo

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.3 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama, RPJMD, dan Pendanaan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3.
Sub Kegiatan prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan perizinan non usaha	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	
			Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	
			Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
3	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum**	**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
5	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama**	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	
			Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
6	**Program Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintahan Desa**	**Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa**	**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
			Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.4. Uraian Sub Kegiatan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Penetapan indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 sebagai berikut :

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Comal

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN KE						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Jumlah Desa / kelurahan mandiri di Kecamatan	Desa / Kelurahan	3	3	2	2	2	2	3	
2	Nilai SKM	Nilai	84,02	84,50	85,00	85,50	86,23	86,50	87,15	
3	Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri	%	17,65	17,65	29,41	41,17	42,93	64,69	82,34	

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Comal dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Comal

No	Indikator Program	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Nilai Sakip	Nilai	60,22	60,50	60,55	61,00	61,50	61,55	62,00
2	**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**	%	74,44	100	100	100	100	100	100
3	**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**	%	100	100	100	100	100	100	100
4	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)**	%	100	100	100	100	100	100	100
5	**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)**	%	100	100	100	100	100	100	100
6	**Persentase kesesuaian RKPDes dan RPJMDes dengan RPJMD (%)**	%	77,78	100	100	100	100	100	100

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan periode Tahun 2025- 2029 dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pemalang yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029. Sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian dan Renstra PD Kabupaten Pemalang yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan di Kabupaten Pemalang.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Kecamatan Comal ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Comal. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman bersama dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Comal serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Pemalang. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Comal merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan dan atau target kinerja sasaran Kecamatan Comal. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Kecamatan Comal yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Comal harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LkjIP) Kecamatan Comal. Laporan Kinerja (LkjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Kecamatan Comal di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Comal ini.

Pemalang, ... Juli 2025

CAMAT COMAL

DEDI SARWOADJI, AP.MH

Pembina TK I

NIP. 19741206 199311 1 001

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 merupakan langkah penting dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Renstra ini disusun dengan tujuan untuk memberikan arah yang jelas bagi pembangunan kecamatan, sekaligus memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan relevan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang ada di tingkat kecamatan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan jangka menengah di tingkat kecamatan, sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Kecamatan Ampelgading merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Pemalang yang memiliki potensi wilayah cukup besar, baik dari segi sumber daya alam maupun letak geografisnya. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi.

Secara internal, Kecamatan Ampelgading masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:

- Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), baik dari segi jumlah maupun kompetensi ASN, yang berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan pelayanan administrasi dan pembangunan kewilayahan.
- Sarana dan prasarana perkantoran yang belum sepenuhnya memadai, seperti keterbatasan ruang pelayanan, peralatan IT, serta fasilitas pendukung lainnya.
- Keterbatasan anggaran operasional, yang berdampak pada pelaksanaan program-program strategis dan inovatif di tingkat kecamatan.

Sementara itu, dari sisi eksternal, Kecamatan Ampelgading menghadapi dinamika masyarakat dan pembangunan wilayah yang kompleks, antara lain:

- Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menuntut peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan publik dasar seperti administrasi kependudukan, infrastruktur jalan dan jembatan, kesehatan, serta pendidikan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

- Tantangan geografis berupa kondisi wilayah yang sebagian besar terdiri dari daerah perbukitan dan rawan bencana seperti longsor dan banjir, terutama saat musim hujan.
- Masih terdapat kesenjangan pembangunan antar wilayah desa, serta rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- Kebutuhan koordinasi lintas sektor dan sinergi antara pemerintah kecamatan, desa, dan OPD di tingkat kabupaten masih perlu ditingkatkan guna menjamin kesinambungan program.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Kecamatan Ampelgading telah mencatat sejumlah capaian penting dalam periode sebelumnya, di antaranya:

- Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan melalui implementasi layanan berbasis digital dan pelayanan keliling ke desa-desa.
- Terlaksananya berbagai kegiatan fasilitasi pembangunan desa dan penguatan kelembagaan masyarakat.
- Terjalinnya koordinasi yang cukup baik antara kecamatan dengan pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan Musrenbang dan prioritas pembangunan kewilayahan.
- Beberapa inovasi pelayanan publik mulai dirintis guna mendekatkan layanan kepada masyarakat, meskipun masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.

Untuk menjawab tantangan yang ada dan meningkatkan capaian kinerja ke depan, Kecamatan Ampelgading memerlukan sejumlah penguatan kelembagaan dan sumber daya, antara lain:

- Peningkatan kapasitas dan jumlah SDM melalui pelatihan, rekrutmen ASN baru, serta penataan jabatan fungsional.
- Dukungan anggaran yang memadai, terutama untuk kegiatan strategis kewilayahan, pelayanan publik, serta penanganan bencana.
- Peningkatan sarana dan prasarana kantor, termasuk fasilitas teknologi informasi untuk mendukung layanan digital dan integrasi data.
- Penguatan peran koordinatif kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan lintas desa dan sektor, agar fungsi kecamatan sebagai ujung tombak pemerintahan daerah di tingkat wilayah dapat berjalan optimal.

Oleh karena itu, penyusunan Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 ini menjadi langkah strategis dalam merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, serta program prioritas yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta tantangan pembangunan wilayah.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pemerintah daerah diberikan kesempatan yang luas dalam merencanakan pembangunan di daerah sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan ini diberikan dalam rangka mengakomodir kebutuhan, karakteristik dan ciri khas yang bersifat kedaerahan untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal demi terwujudnya pembangunan yang mampu memberikan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menjalankan tugasnya, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut.

Pada Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sedangkan pada Pasal 272 menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada RPJMD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah penjabaran dari visi, **“Pemalang Bercahaya” (Bersih, Cakap, Handal, Mulya)** dan Misi **RHAPSODI (Resik, Hijau, Apik, Peduli, Silaturahmi, Organisatoris, Digitalisasi, dan Ikhlas).**

Renstra Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pemalang, yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dinas Kebudayaan yang menjalankan urusan wajib bidang Kebudayaan serta bersifat indikatif. Renstra disusun untuk menjamin keberlangsungan dan konsistensi program dan kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Selain itu renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan.

Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dalam menyusun Renstra mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Pemalang juga memperhatikan beberapa dokumen perencanaan lain, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pemalang, Kajian LingkunganHidup Strategis (KLHS) Kabupaten Pemalang; Renstra Kementerian Kebudayaan RI dan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Keterkaitan penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya

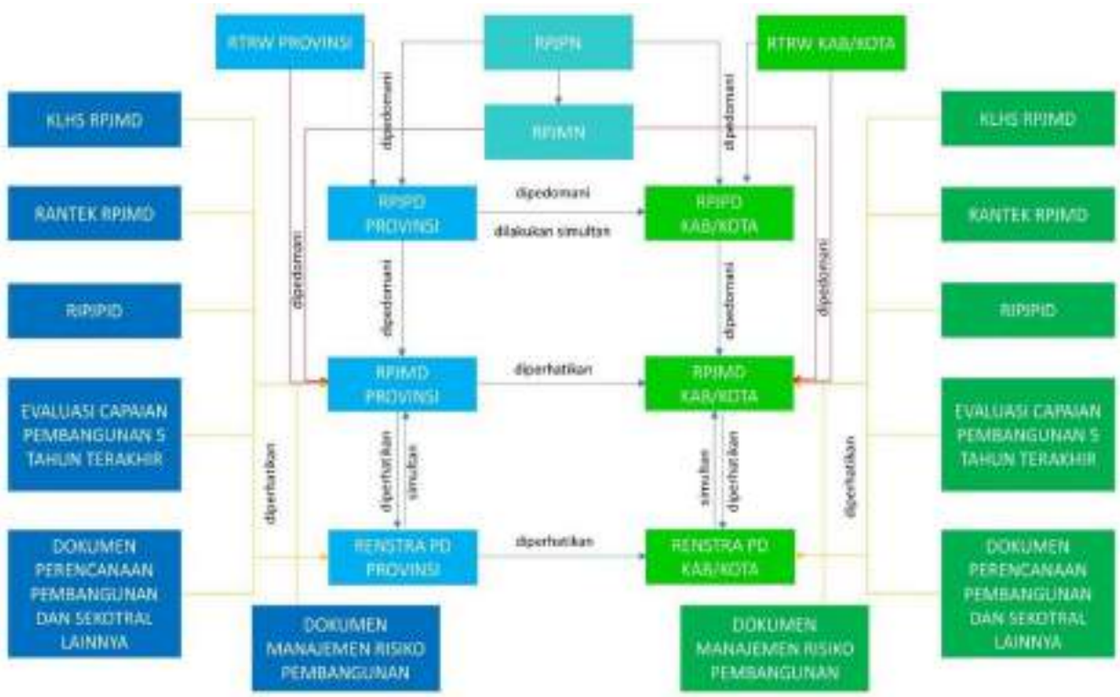

Dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan memberikan pedoman, arah dan tujuan yang jelas bagi Dinas Kebudayaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Daerah Kabupaten Pemalang periode tahun 2025- 2029. Renstra ini selanjutnya juga dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan sebagai dokumen perencanaan tahunan dan acuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan.

1.2. Dasar Hukum

https://jdih.pemalangkab.go.id

Penyusunan Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2021-2026, berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah Terakhir diubah dengan UU No. 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1313);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik

https://jdih.pemalangkab.go.id

Indonesia Tahun 20217 Nomor 1419);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ...);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2021 tentang

https://jdih.pemalangkab.go.id

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021- 2050 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 9);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang; (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029;
28. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
29. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah kebijakan, pedoman dan penjelasan program pembangunan Kebudayaan lima tahun ke depan bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) baik pemerintah daerah, masyarakat dan swasta dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama untuk urusan Kebudayaan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030.

Sedangkan Tujuan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala Bupati dan Wakil Bupati terpilih

https://jdih.pemalangkab.go.id

ke dalam tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dalam rangka melaksanakan pembangunan Kebudayaan di Kabupaten Pemalang;

2. Sebagai dokumen perencanaan bagi unit kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Pemalang dalam menentukan prioritas program disertai pagu anggaran dan target indikator kinerja tahun 2025-2029.
3. Sebagai acuan jajaran aparatur Dinas Kebudayaan Kabupaten Pemalang dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur berikut strategi dan arah kebijakan rentang tahun 2025-2029.
4. Sebagai pedoman pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi capaian kinerja pembangunan Kebudayaan periode tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian dokumen Renstra Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 mengacu pada sistematika penulisan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan memuat :

1. Latar Belakang;
2. Dasar Hukum Penyusunan;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang

1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang paling sedikit memuat :
   a. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang;
   b. Sumber Daya Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang;
   c. Kinerja Pelayanan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang; dan
   d. Kelompok Sasaran Layanan.
2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang memuat :
   a. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang; dan
   b. Isu Strategis.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan memuat :

1. Tujuan Renstra Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029;
3. Strategi Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029;
4. Arah Kebijakan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan memuat :

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif;
4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra B..... Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) B..... Kabupaten Pemalang; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN AMPELGADING

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Ampelgading

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Ampelgading

Kecamatan Ampelgading dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

A. Camat

https://jdih.pemalangkab.go.id

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Camat mempunyai uraian tugas :

1. Mengarahkan penyusunan dokumen perencanaan kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan organisasi, perencanaan partisipatif dan perencanaan yang lebih tinggi dan ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Merumuskan kebijakan kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Merumuskan inovasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
4. Mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan kecamatan, meliputi kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan umum dan kesekretariatan sesuai dengan tugas fungsi dan pedoman pelaksanaan agar tepat sasaran dan tujuan;
5. Mengarahkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan dengan melalui bimbingan, supervisi, fasilitasi dan evaluasi guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan;
6. Mengarahkan penyediaan dan pelayaan informasi publik serta penyusunan data dan informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
7. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsinya guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh PD kabupaten yang ada di kecamatan sesuai dengan petunjuk pimpinan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;

https://jdih.pemalangkab.go.id

9. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan Peraturan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
10. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Merumuskan laporan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kerja organisasi.

B. Sekretaris Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan kesekretariatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian sesuai dengan kebituhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;

https://jdih.pemalangkab.go.id

5. Mengoordinasikan penyusunan kondep inovasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
9. Melaksanakan tugas dan kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

a. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Menyusun konsep dokumen perencanaan Kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan oprganisasi, perencanaan partisipatif, dan perencanaanyang lebih tinggi guna dirumuskan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep laporan capaian kinerja Kecamatan yang meliputi LkjIP, laporan pelaksanaan APBD dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

laporan kinerja lain berdasarkan Renja dan realisasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban;

5. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib adminstrasi;
6. Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan keuangan;
7. Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi LRA, LO, LPE, neraca dan CaLK serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;
8. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
10. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kecamata sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepasa pimpinan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai sengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengelola kegiatan administrasi surat menyurat, kepegawaian, penataan arsip, dokumentas, dan kearsipan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
4. Mengelola kegiatan kerumahtanggaan meliputi penyediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, pelayanan tamu dinas dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Mengelola administrasi barang milik daerah yang meliputi penyusunan analisa kebutuhan dan pemeliharaan barang, penatausahaan barang, dan penyusunan administrasi barang lainnya sesuai dengan peraturan pengelolaan barang milik daerah guna tertib administrasi;
6. Mengelola kegiatan ketatalaksanaan meliputi penyusunan standart dan prosedur kerja sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Mengelola kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi penyediaan dan pelayanan informasi publik, penyusunan data informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian, pengaturan tata tempat dan tata acara serta kegiatan kehumasan dan keprotokolan lain sesuai

https://jdih.pemalangkab.go.id

dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

8. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

C. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta, dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan memeriksa berkas yang diajukan kepala desa sebagai bahan konsultasi kepada pimpinan guna disahkan oleh pimpinan;
5. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan melalui fasilitasi

https://jdih.pemalangkab.go.id

penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, fasilitasi pemberian tunjangan perangkat desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;

6. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Seksi Tata Pemerintahan meliputi data monografi desa, data perangkat desa dan data terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
8. Menyusun konsep motivasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

D. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas :

https://jdih.pemalangkab.go.id

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, keagamaan, pembinaan kesehatan, keluarga berencana, organisasi perempuan, pendidikan, pemuda dan olahraga dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan sosial desa melalui fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pembangunan desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjaama desa dengan pihak ketiga, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, koordinasi pendampingan desa, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial guna tertib administrasi dan kelancaran dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dengan melibatkan stakeholder terkait demi tercapainya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran;
6. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui analisis potensi

https://jdih.pemalangkab.go.id

dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;

8. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan dan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawabkan kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

E. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan meliputi fasilitasi pengaduan masyarakat, kejadian musibag, bencana umum atau kejadian luar biasa lainnya serta upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lainnya dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan pemuka agama/tokoh masyarakat serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum;

https://jdih.pemalangkab.go.id

4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau desa/kelurahan serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna tegaknya peraturan;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah yang ada di wilayah kecamatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dan/atau swasta dan/atau pihak terkait lainnya sesuai dengan prosesur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keamanan dan terpeliharanya prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah;
6. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan yang bergerak di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
7. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kebutuhan informasi publik;
9. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

F. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan kegiatan koordinasi terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan dan kabupaten, pemerintah desa/kelurahan, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep rencana operasional dan standar pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
5. Melaksanakan kegiatan fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan di bidang perizinan, non perizinan, administrasi pertanahan dan pelayanan administrasi lainnya sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dan pemeriksaan dokumen/berkas permohonan, cek lokasi apabila disyaratkan, pengesahan hingga penyampaian kembali dokumen/berkas kepada pemohon guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
6. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan prosedur dan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
7. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tercapainya kepuasan masyarakat;
8. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh

https://jdih.pemalangkab.go.id

pemerintah desa/kelurahan dan pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;

9. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
10. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Ampelgading mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kecamatan Ampelgading

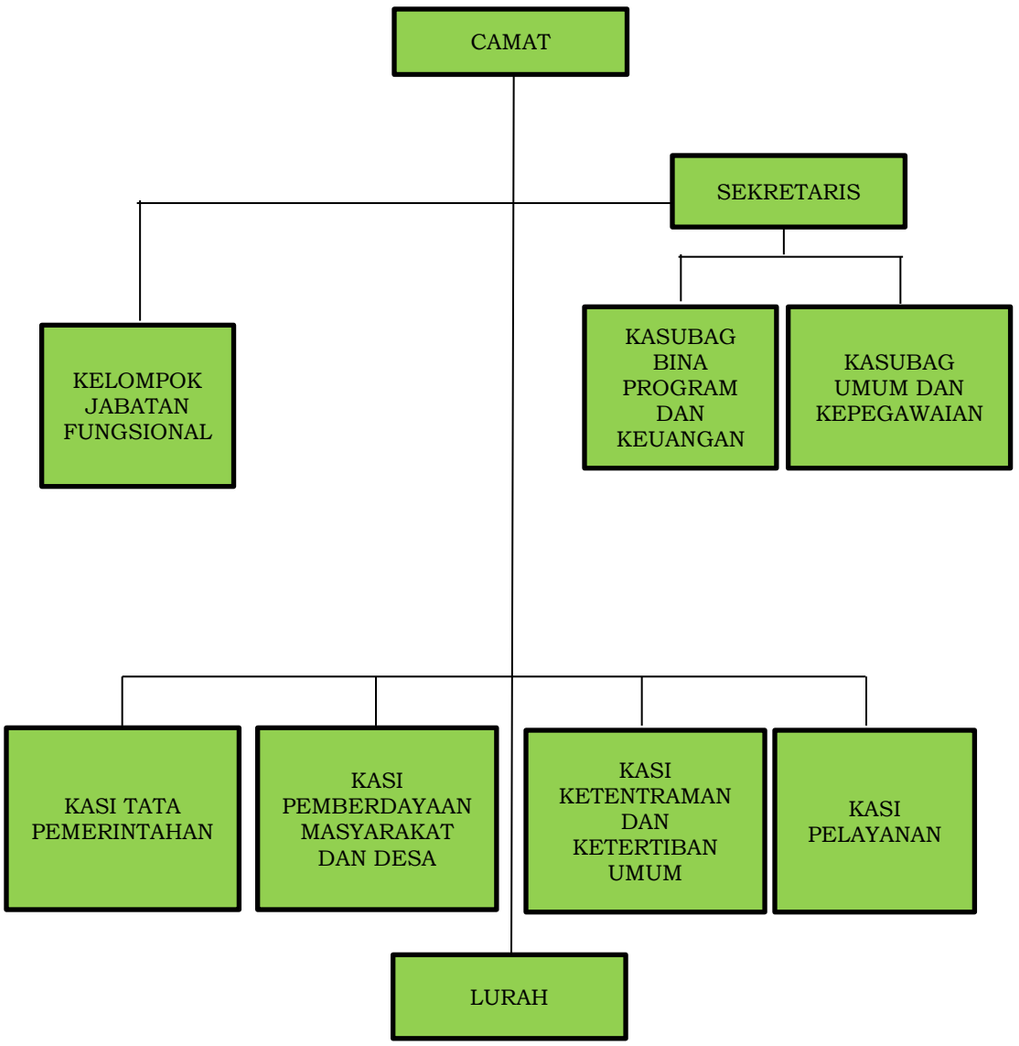

Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Ampelgading

Sumber daya Kecamatan Ampelgading sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

a. Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Jumlah pegawai di Kecamatan Ampelgading dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyakatan sosial tersaji dalam tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.1.

Pegawai Kecamatan Ampelgading

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Golongan				Jumlah
				I	II	III	IV	
1	Camat	1	0	0	0	0	1	1
2	Sekcam	1	0	0	0	0	1	1
3	Kasubag	2	0	0	0	2	0	2
4	Kasi Kecamatan	2	0	0	0	1	1	2
5	JFU Kecamatan	6	2	0	2	5	0	8
6	JFT Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0
7	Non ASN Kecamatan	8	3	0	0	0	0	11
Jumlah		20	5	0	2	9	3	25

Sumber : Sekretariat Kecamatan Ampelgading, 2025

Pegawai Kecamatan Ampelgading berjumlah 25 orang, meliputi -20 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Ampelgading dominan laki-laki yaitu sebanyak 80%. Agar kecamatan Ampelgading menerapkan responsif gender, untuk perekrutan tenaga non ASN selanjutnya disarankan berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya jumlah pegawai berdasar golongan, meliputi non ASN sebanyak 11 orang, golongan II sebanyak 2 orang, golongan III sebanyak 9 orang dan golongan IV sebanyak 3 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Ampelgading didominasi oleh ASN sebanyak 56% dan didominasi oleh pegawai bergolongan III yaitu sebanyak 36 %.

Tabel 2.2.

Data Pegawai Berdasar Diklat Kepemimpinan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Diklatpim III	3	3	0
2	Diklatpim IV	4	2	2
3	ADUM	0	0	0
4	SEPADA	0	0	0
5	Struktural yang belum diklat	1	1	0
Jumlah		8	6	2

Sumber : Sekretariat Kecamatan Ampelgading 2024

https://jdih.pemalangkab.go.id

Jumlah pegawai berdasarkan diklat kepemimpinan pada Kecamatan Ampelgading, yaitu 3 orang sudah mengikuti Diklatpim III dan 4 orang sudah mengikuti Diklatpim IV. Semua Pejabat Struktural pada Kecamatan Ampelgading 1 orang mengikuti diklat.

Tabel 2.3.

Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pasca Sarjana (S2)	1	1	0
2	Sarjana (S1)	12	10	2
3	Diploma	1	0	1
4	SLTA	6	4	2
5	SLTP	2	2	0
6	SD	3	3	0
Jumlah		25	20	5

Sumber : Sekretariat Kecamatan Ampelgading, 2024

Jumlah pegawai Kecamatan Ampelgading berdasar tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S2) sebanyak 1 orang, Sarjana (S1) sebanyak 12 orang, Diploma sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 6 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara kualitas SDM di Kecamatan Ampelgading sudah tercukupi, yaitu dengan dominansi berpendidikan S1 sebanyak 48%.

Tabel 2.4.

Data Pegawai Berdasar Tingkat Eselon

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	IIIA	1	1	0
2	IIIB	1	1	0
3	IVA	2	2	0
4	IVB	2	2	0
Jumlah		6	7	0

Sumber : Sekretariat Kecamatan Ampelgading., 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

Jumlah pegawai Kecamatan Ampelgading berdasarkan tingkat eselon, yaitu Eselon IIIA sebanyak 1 orang, Eselon IIIB sebanyak 1 orang, Eselon IVA sebanyak 2 orang, Eselon IVB sebanyak 2 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Kecamatan Ampelgading berdasarkan tingkat eselon cukup merata.

a. Sarana dan Prasarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Kecamatan Ampelgading dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5.

Inventaris Aset Kecamatan Ampelgading

No	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Jumlah Harga (Rp)
					Baik	Sedang	Rusak	
1	01		Tanah					
		01	Tanah	1(890)				222.500.000
			Jumlah KIB A					**222.500.000**
2	01		Peralatan dan Mesin					
		02	Alat-alat Besar	1	1			7.500.000
		03	Alat-alat Angkutan	15	10	5		635.290.028
		04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1				275.000
		05	Alat Pertanian					
		06	Alat Kantor & Rumah Tangga	201	100	85	16	403.129.052
		07	Alat Studia & Alat Komunikasi	8	7		1	24.421.571
		08	Alat-alat Kedokteran					
		09	Alat Laboratorium					
		10	Alat-alat persenjataan/keamanan					

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Jumlah Harga (Rp)
					Baik	Sedang	Rusak	
			Jumlah KIB B					**1.257.754.150**
3	03		Gedung dan Bangunan	4	4			884.838.500
		11	Bangunan Gedung					
		12	Monumen					
			Jumlah KIB C					**884.838.500**
4	04		Jalan, Irigasi dan Jaringan					
		13	Jalan & Jembatan					
		14	Bangunan Air/Irigasi					
		15	Instalasi	1	1			2.500.000
		16	Jaringan	1	1			500.000
			Jumlah KIB D					**3.000.000**
5	05		Aset Tetap Lainnya	1	1			650.000
		17	Buku dan Perpustakaan					
		18	Barang Bercorak Kebudayaan					
		19	Hewan, Ternak dan Tanaman					
			Jumlah KIB E					**650.000**
6	06		Konstruksi dalam Pengerjaan					
			Jumlah KIB F					
			Jumlah Total	**234**	**125**	**90**	**17**	**2.181.604.151**

Sumber : Sekretariat Kecamatan Ampelgading., 2025

Berdasar tabel 2.5, sarana dan prasarana perkantoran yang dimiliki oleh Kecamatan Ampelgading sudah cukup dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Administrasi Kewilayahan

Terdapat 16 desa di Kecamatan Ampelgading dengan perincian sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.6.

Administrasi Kewilayahan Kecamatan Ampelgading

No	Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT	Jumlah Perangkat Desa	Jumlah Linmas	Ket
1	Sokawati	4	6	18	10	18	
2	Tegalsari Timur	6	8	45	13	54	
3	Tegalsari Barat	3	6	30	10	45	
4	Wonogiri	3	5	26	10	36	
5	Kemuning	1	2	10	8	20	
6	Karangtalok	3	12	28	10	31	
7	Blimbing	2	4	14	10	27	
8	Ampelgading	4	4	19	11	20	
9	Karangtengah	2	4	16	8	29	
10	Banglarangan	2	5	19	8	30	
11	Cibiyuk	3	3	18	10	30	
12	Losari	4	5	27	9	42	
13	Ujunggede	7	7	43	14	42	
14	Jatirejo	3	10	39	10	40	
15	Kebagusan	5	5	30	11	49	
16	Sidokare	2	6	29	6	44	
Jumlah		54	92	411	158	557	

Sumber : Sekretariat Kecamatan Ampelgading, 2025

Kecamatan Ampelgading terdiri dari 16 desa, 92 RW dan 411 RT. Untuk menjaga ketentraman dan ketertiban wilayah, Kecamatan didukung oleh 557 personil Linmas

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Ampelgading

Kinerja pelayanan Kecamatan ampelgading bisa dilihat pada tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel berikut Tabel 2.7.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
						2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks				NA	NA	36	37,50	NA	NA	NA	40,63	NA	NA	NA	NA	112,86	NA	NA
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Intasi Pemerintah	Nilai				NA	NA	52	60	62	NA	NA	51,65	60,04	NA	NA	NA	99,32	100,07	NA
3	Cakupan Layanan Kecamatan					92,18	93,33	93,44	94,68	94,68	92,18	93,33	93,43	93,68	NA	100	100	99,98	98,94	NA
4	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan					NA	80	82	88	88,20	NA	87,80	87,91	88,19	NA	NA	110	107	100	NA

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
						2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5	Persentase pelayanan publik yang tersedia	%				87	87,00	87,00	88,89	88,89	87	87,00	88,89	87,89	NA	100	100	102	98,87	NA
6	Persentase masyarakat desa yang aktif	%				95	96,00	96,00	97,00	97,00	95	96,00	97,00	96,00	NA	100	100	100	98,96	NA
7	Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%				97,1	98,50	99,20	100,00	100	97,1	98,50	100,00	100,00	NA	100	100	100	100	NA
8	Persentase potensi konflik	%				96,8	99,60	100,00	100,00	100,00	96,8	99,60	100,00	100,00		100	100	100	100	

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
						2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	tingkat desa dan kecamatan yang tertangani																			
9	Persentase Desa bertata kelola Pemerintahan baik	%				85	85,55	85,00	87,50	87,50	85	85,55	81,25	84,50		100	100	95,98	96,57	

Sumber : Kecamatan Ampelgading, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

Berdasarkan tabel 2.7. dapat diketahui pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Ampelgading selama tahun 2021-2025 sebagai berikut :

1. Melebihi target, meliputi :
   - Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023
   - Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023
   - Persentase pelayanan publik yang tersedia tahun 2023

   Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :

   a. Komitmen dari semua pihak;
   b. Sarana dan prasarana yang memadai;
   c. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM;
   d. Komunikasi dan koordinasi yang intens antar instansi.

2. Memenuhi target, meliputi :
   - Nilai LKJIP Tahun 2024
   - Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan tahun 2024
   - Cakupan layanan kecamatan tahun tahun 2021 dan 2022
   - Persentase pelayanan publik yang tersedia tahun 2024, 2022 dan 2023
   - Persentase masyarakat desa yang aktif tahun 2021, 2022 dan 2023
   - Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan tahun 2021-2024
   - Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani tahun 2021-2024
   - Persentase Desa bertata kelola Pemerintahan baik tahun 2021 dan 2022

   Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :

   a. Komitmen dari semua pihak;
   b. Sarana dan prasarana yang memadai;
   c. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM;
   d. Komunikasi dan koordinasi yang intens antar instansi

https://jdih.pemalangkab.go.id

3. Tidak memenuhi target, meliputi :
   - Nilai LKJIP Tahun 2023
   - Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan tahun 2024
   - Cakupan layanan kecamatan tahun tahun 2023 dan 2024
   - Persentase pelayanan publik yang tersedia tahun 2024
   - Persentase masyarakat desa yang aktif tahun 2024
   - Persentase Desa bertata kelola Pemerintahan baik tahun 2024

Tabel 2.8.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ampelgading Kabupaten

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	Nilai RB					40,63	NA
	Nilai SAKIP					51,65	60,04
1	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	%	100	100	100	100	100
2	Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	%	NA	66,67	63,33	70,73	87,72
3	Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan	%	97	96	100	100	100
4	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi	%	83,33	83,33	83,33	83,33	96
5	Persentase jalan kewenangan kelurahan kondisi baik	%	-	-	-	-	-
6	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	%	95	100	100	100	100
7	Jumlah potensi konflik	kasus	0	0	0	0	0
8	Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik	%	75	75	75	69,50	84,50

Sumber : Kecamatan Ampelgading, 2024

https://jdih.pemalangkab.go.id

Persentase capaian PBB Kecamatan Ampelgading selama kurun waktu tahun 2021-2025 cenderung meningkat yaitu sebesar ..... pada tahun 2021 menjadi sebesar ..... pada tahun 2024. Hal ini disebabkan adanya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB, sehingga kemampuan membayar PBB juga meningkat.

Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani selama kurun waktu tahun 2021-2025 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada pengaduan masyarakat di kecamatan dapat ditangani dengan baik dan tepat waktu.

Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2021-2025 cenderung meningkat, yaitu sebesar 38% pada tahun 2016 menjadi sebesar 87,72% pada tahun 2024. Hal tersebut disebabkan adanya dukungan sumber daya manusia, tersedianya anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas serta adanya dukungan dari PD terkait.

Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2021-2025 cenderung meningkat, yaitu sebesar 90% pada tahun 2021 menjadi sebesar 98% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa ada kepedulian tinggi dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang diselenggarakan mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai kecamatan.

Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD) yang dibina selama kurun waktu tahun 2021-2025 cenderung meningkat, yaitu sebesar 48% pada tahun 2016 menjadi sebesar 75% pada tahun 2020. LKD yang dibina yaitu RW, PKK, karang taruna, Posyandu, LPMD/K dan RT.

Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi selama kurun waktu tahun 2021-2025 cenderung meningkat, yaitu sebesar 35% pada tahun 2021 menjadi sebesar 50% pada tahun 2024. LKD merupakan mitra kecamatan dalam pembangunan kecamatan sehingga perlu untuk difasilitasi kegiatannya.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani selama kurun waktu tahun 2021-2025 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada gangguan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan dapat ditangani dengan baik.

Jumlah potensi konflik selama kurun waktu tahun 2021-2025 cenderung menurun, yaitu sebesar 3 kasus pada tahun 2021 menjadi sebesar 0 kasus pada tahun 2025. Potensi konflik yang pernah ada ini terjadi antar desa akibat adanya perbedaan pendapat dan kesalahpahaman. Namun, potensi konflik yang terjadi tersebut dapat diselesaikan dengan baik lewat koordinasi di tingkat kecamatan.

Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik dalam kurun waktu tahun 2021-2025 cenderung meningkat, yaitu sebesar ..... % pada tahun 2021 menjadi sebesar .....% pada tahun 2025. Meskipun meningkat capaian tersebut masih jauh dari target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya kendala yang terjadi di kecamatan, mulai dari kurang siapnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas serta kurangnya dukungan dari PD terkait.

Selain indikator pada Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2021-2025 dan pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 terdapat pula indikator kinerja berdasar SDG's, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021. Namun, untuk Kecamatan Pemalang tidak terdapat indikator kinerja dari ketiga regulasi tersebut sehingga ditulis NIHIL.

Tabel 2.9.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Berdasarkan SDGs

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun

https://jdih.pemalangkab.go.id

		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2	**NIHIL**					
3						

Sumber : Kecamatan Ampelgading, 2025

Tabel 2.10

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2	**NIHIL**					
3						

Sumber : Kecamatan Ampelgading, 2021

Tabel 2.11

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2	**NIHIL**					
3						

Sumber : Kecamatan Ampelgading

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.12.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang

Uraian	Anggaran Pada Tahun (dalam juta)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (dalam juta)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (dalam juta)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.276	3.161	2.509	3053	2.882	3.127	2.915	2.411	2864		95,45	92,21	96,09	93,80			
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	26	40	18	15	15	23	40	18	15		88,46	100	100	100			
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	41	37	43	47	50	41	37	43	47		100	100	100	100			
Program Koordinasi	0	0	13	2	0	0	18	13	2		0	0	100	100			

https://jdih.pemalangkab.go.id

Uraian	Anggaran Pada Tahun (dalam juta)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (dalam juta)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (dalam juta)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Ketentraman Dan Ketertiban Umum																	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	59	56	64	65	57	59	56	64	65		100	100	100	100			
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	64	54	27	36	36	59	54	27	36		92,18	100	100	100			
Jumlah																	
Rata-rata																	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sumber : Kecamatan Ampelgading, 2024

Berdasar tabel 2.9, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu tahun 2021-2025 rasio antara realisasi dan anggaran Kecamatan Ampelgading cenderung meningkat, yaitu dengan rata-rata sebesar 79,34% pada tahun 2021 menjadi sebesar 98,96 % pada tahun 2024. Hal ini berarti dana yang sudah dianggarkan dapat terserap secara optimal untuk pelaksanaan pelayanan Kecamatan Ampelgading. Besaran anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Ampelgading selama kurun waktu tahun 2021-2025 cenderung menurun rata-rata penurunan sebesar 2%. Besaran realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2021-2025 juga cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 8,%. Penurunan anggaran menjadi salah satu kendala tercapainya target kinerja pelayanan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam melaksanakan pelayanan, yang menjadi sasaran layanan adalah masyarakat secara umum, lembaga kemasyarakan dan desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Ampelgading

2.1.5. Mitra Kecamatan Ampelgading

Untuk terciptanya harmonisasi hubungan dengan lembaga vertikal dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Ampelgading, yang menjadi mitra adalah Kepolisian Sektor Ampelgading, Komando Rayon Militer Ampelgading serta Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampelgading.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Ampelgading

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Ampelgading

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik Kecamatan Ampelgading tidak lepas dari permasalahan yang timbul selama berjalannya waktu. Permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan, salah satunya adalah aspek pelayanan publik, ditandai dengan indeks pelayanan publik tahun 2023 yang masih rendah. Di Kecamatan Ampelgading pelayanan publik masih kurang optimal yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor sarana prasarana, sumber daya manusia dan teknologi.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2. Belum optimalnya integrasi sistem informasi pendukung penyelenggaraan pemerintahan. Di tingkat kecamatan sistem yang ada belum sepenuhnya terintegrasi sehingga masih sering terjadi miskomunikasi dan ketidakakuratan data.
3. Perlu koordinasi dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan
4. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait tata kelola pemerintahan desa, dimana di tahun 2021 baru sebanyak 72,63% desa yang sudah bertata kelola pemerintahan baik
5. Perlu peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan
6. Pemenuhan dan perbaikan sarpras kecamatan
7. Terlalu banyak SIM yang harus di entry di tingkat desa sementara SDM yang paham IT di tingkat desa terbatas
8. Perlu peningkatan kapasitas linmas
9. Perlu penganggaran fasilitasi lembaga kemasyarakatan selain PKK

2.2.2. Isu Strategis

Kecamatan Ampelgading dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Ampelgading tahun 2025-2029, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Ampelgading adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman;

https://jdih.pemalangkab.go.id

2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan;
6. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran;
7. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Ampelgading adalah sebagai berikut:

1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya PD dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
3. Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa;
6. Adanya pendampingan dari PD terkait;
7. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena

https://jdih.pemalangkab.go.id

dampaknya yang signifikan di masa depan. Hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Kecamatan Ampelgading, telaah visi misi dan program prioritas Bupati, dan telaah Renstra Kemendagri/Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang yang meliputi potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi pada periode sebelumnya, dirumuskan isu strategis Kecamatan Ampelgading yaitu **"Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan Ampelgading".**

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan yang dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
			Gangguan akibat cuaca ekstrem dapat mempersulit akses masyarakat ke kantor kecamatan dan pelayanan dasar, termasuk pelayanan administrasi kependudukan, koordinasi bencana, dan pengawasan wilayah.	Kondisi lingkungan yang tidak sehat dan belum tertata menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap kualitas layanan kecamatan, serta berdampak pada kesehatan masyarakat dan beban administrasi penanganannya	Minimnya akses terhadap air bersih dan sanitasi layak di beberapa desa memperburuk kualitas pelayanan kesehatan, dan memunculkan kebutuhan layanan koordinatif yang lebih responsif dari kantor kecamatan,	Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan Ampelgading

https://jdih.pemalangkab.go.id

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan yang dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
					yang belum sepenuhnya terfasilitasi oleh SDM dan sistem yang ada.	

Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan Ampelgading tidak semata-mata disebabkan oleh aspek kelembagaan atau SDM, melainkan juga dipengaruhi oleh **tekanan isu lingkungan global hingga lokal**. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya integratif dalam peningkatan kapasitas layanan publik, termasuk:

- Peningkatan ketangguhan infrastruktur pelayanan terhadap risiko iklim.
- Digitalisasi dan pemetaan layanan publik berbasis data lingkungan.
- Pemberdayaan masyarakat dalam partisipasi pengelolaan lingkungan berbasis wilayah.

2.3. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Ampelgading

Hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Kebudayaan RI tahun 2000-2014 dan Renstra Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 menunjukkan bahwa tantangan yang perlu untuk ditindaklanjuti

Kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi di Kabupaten Pemalang juga menjadi tantangan yang mempengaruhi status masyarakat dalam mengakses pelayanan kecamatan, hal ini menuntut penyelenggaraan pelayanan kecamatan yang terjangkau, adil dan bermutu bagi seluruh masyarakat pada semua tingkatan sosial ekonomi dan perbaikan pengelolaan jaminan Kebudayaan nasional.

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Kecamatan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Ampelgading Kabupaten Pemalang dalam rangka mendorong peningkatan dan pengembangan pelayanan Kecamatan Ampelgading adalah dukungan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pemalang terpilih terhadap urusan yang dilimpahkan kepada Camat sangat besar dan menjadi salah satu prioritas sektor pembangunan yang teruang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang.

Peluang lain dalam upaya peningkatan pelayanan Kecamatan Ampelgading adalah meningkatnya dukungan pendanaan pemerintah untuk menunjang sarana dan prasarana pelayanan di kecamatan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Kecamatan Ampelgading dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang pelayanan publik, maka Kecamatan Ampelgading harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Kecamatan Ampelgading secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat secara umum.

3.1. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Ampelgading selama tahun 2021–2026 adalah "**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan**". Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ampelgading sebagai perangkat daerah yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman. Tujuan tersebut diukur dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan yang merupakan hasil survei kepuasan masyarakat.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra
Kecamatan Ampelgading

Tujuan	Indikator	Target Tahun						Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan	Persentase desa/kelurahan mandiri di Kecamatan	62	65	70	75	80	85	

3.2. Sasaran

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Ampelgading dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Ampelgading selama tahun 2021-2026, adalah "**Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah**". Sasaran tersebut diukur dengan indikator cakupan layanan kecamatan yang diperoleh dari rerata persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif, persentase gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang dapat diselesaikan, persentase potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang tertangani, serta persentase desa bertata kelola pemerintahan baik.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Ampelgading dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.2.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Ampelgading

NSPK	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan sasaran	Baseline Tahun		Target Capaian					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan		Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan	52	60	62	65	70	75	80	85
		Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah	IKM	87,91	88,19	88,20	90,20	92,20	94,20	96,20	98,00
			Nilai SAKIP OPD		60,04	62	67	72	77	80	85

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan sasaran	Baseline Tahun		Target Capaian					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	SEBARAN INDIKATOR PROGRAM										
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyeelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persesntase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun		87,72	88,89	88,89	90,94	93,85	96,60	100
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif			97	97,20	98,10	98,10	98,40	100
			Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan)								
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani		100	100	100	100	100	100	100
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani		81,25	100	100	100	100	100	100

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan sasaran	Baseline Tahun		Target Capaian					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase kesesuaian RKPDes dan RPJMDes dengan RPJMD		84,50	87,50	88,89	90,98	93,87	95,80	100

https://jdih.pemalangkab.go.id

3.3. Strategi

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Kecamatan Ampelgading guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Kecamatan Ampelgading dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Pemalang Bercahaya (Bersih, Cakap, Handal, Mulya)			
Misi 6 : Organisatoris (Meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi)			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	1. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan 2. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital 3. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Lokal 4. Optimalisasi Potensi Wilayah 5. Standarisasi dan Digitalisasi Layanan Publik 6. Peningkatan Kompetensi dan Etika SDM Aparatur 7. Penguatan Infrastruktur dan Sarana Layanan 8. Penguatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif 9. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan 10. Fasilitasi Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat	1. Penguatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan 2. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Publik 3. Penerapan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) 4. Penguatan Peran Serta dan Kemandirian Masyarakat 5. Digitalisasi dan Inovasi Layanan Pemerintahan 6. Sinkronisasi dan Kolaborasi Lintas Sektor 7. Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Pelayanan

Tabel : 3.2 Tahapan Rencana Strategis

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

https://jdih.pemalangkab.go.id

3.4. Arah Kebijakan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat di tingkat kecamatan, arah kebijakan pembangunan Kecamatan selama lima tahun ke depan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar yang merata, pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, dan pelestarian lingkungan hidup.

Kebijakan pembangunan Kecamatan difokuskan pada pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan berbasis data, dengan mempertimbangkan potensi wilayah serta aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui mekanisme perencanaan partisipatif seperti Musrenbang. Peran kecamatan sebagai simpul koordinasi pembangunan wilayah akan diperkuat melalui peningkatan kapasitas tata kelola, pemanfaatan teknologi informasi, serta sinergi dengan instansi vertikal, OPD di tingkat kabupaten, dan lembaga kemasyarakatan.

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	1. Penguatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan 2. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Publik 3. Penerapan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) 4. Penguatan Peran Serta dan Kemandirian Masyarakat 5. Digitalisasi dan Inovasi Layanan Pemerintahan 6. Sinkronisasi dan Kolaborasi Lintas Sektor 7. Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Pelayanan

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Ampelgading yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029 :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
      d. Sub Kegiatan Penyusunan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
   3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

https://jdih.pemalangkab.go.id

b. Sub Kegiatan Penatausahaan barang milik daerah SKPD

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas berserta atribut kelengkapananya.
   b. Sub Kegiatan Peningkatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
   c. Sub Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
   c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   h. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
   c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

https://jdih.pemalangkab.go.id

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
    c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
    e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
    1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
        a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
    2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
        a. Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
        b. Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
        c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
    3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
        a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
        b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
    1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
        a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

https://jdih.pemalangkab.go.id

b. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
   a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
   b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
      a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
   2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
      a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
      a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
      b. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
      c. Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

https://jdih.pemalangkab.go.id

d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

F. Program Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintahan Desa

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
   b. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
   c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
   d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
   e. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
   f. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
   g. Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
   h. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
   i. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
   j. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Kecamatan Ampelgading selama tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada Gambar berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

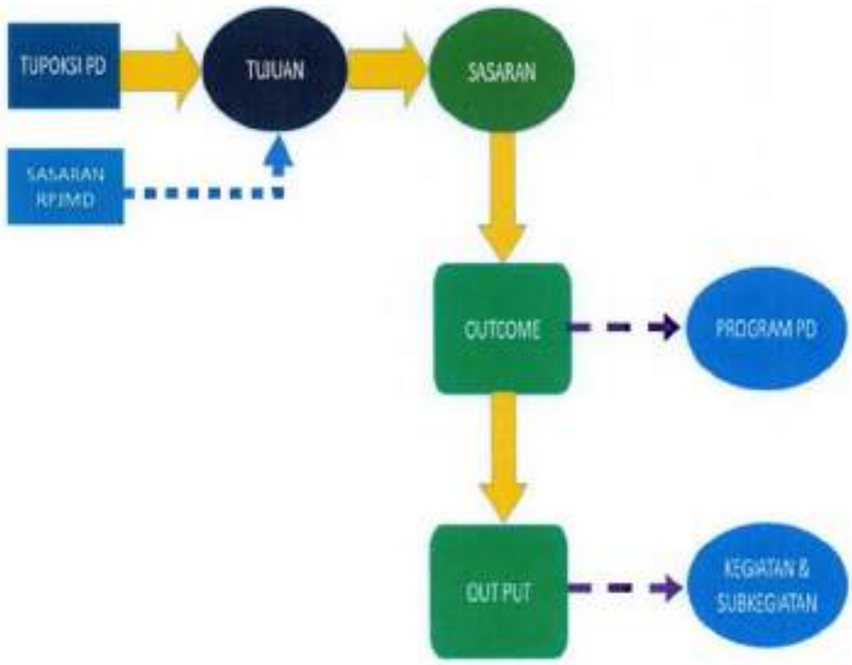

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan				Persentase desa dengan status mandiri di wilayah Kecamatan		
		Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat			Nilai SKM		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Prosentase meningkatnya jumlah Desa Mandiri		
			Meningkatnya kualitas penyeelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Persesntase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	
			Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan yang Efektif		Persentase efektiftas kegiatan di Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
UNSUR KEWILAYAHAN				**3.116.115.000**		**3.342.468.663**		**3.342.468.663**		**3.342.468.663**		**3.342.468.663**	
KECAMATAN ADMINISTRASI				**3.116.115.000**		**3.342.468.663**		**3.342.468.663**		**3.342.468.663**		**3.342.468.663**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota**	**100 %**	**100 %**	**2.903.747.000**	**100 %**	**3.215.456.663**	**100 %**	**3.215.456.663**	**100 %**	**3.215.456.663**	**100 %**	**3.215.456.663**	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai regulasi**	**16 Dokumen**	**16 Dokumen**	**12.047.800**	**16 Dokumen**	**12.047.800**	**16 Dokumen**	**12.047.800**	**16 Dokumen**	**12.047.800**	**16 Dokumen**	**12.047.800**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000	2 Dokumen	1.500.000	2 Dokumen	1.500.000	2 Dokumen	1.500.000	2 Dokumen	1.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	2.110.000	1 Dokumen	2.110.000	1 Dokumen	2.110.000	1 Dokumen	2.110.000	1 Dokumen	2.110.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.937.800	1 Dokumen	1.937.800	1 Dokumen	1.937.800	1 Dokumen	1.937.800	1 Dokumen	1.937.800	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	1.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	4 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**2.247.140.000**	**4 Laporan**	**2.677.549.663**	**4 Laporan**	**2.677.549.663**	**4 Laporan**	**2.677.549.663**	**4 Laporan**	**2.677.549.663**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang	14 Orang	2.243.265.000	15 Orang	2.673.674.663	15 Orang	2.673.674.663	15 Orang	2.673.674.663	15 Orang	2.673.674.663	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 Laporan	1 Laporan	1.639.000	2 Laporan	1.639.000	2 Laporan	1.639.000	2 Laporan	1.639.000	2 Laporan	1.639.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	1.000.000	4 Laporan	1.000.000	4 Laporan	1.000.000	4 Laporan	1.000.000	4 Laporan	1.000.000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1.236.000	1 Dokumen	1.236.000	1 Dokumen	1.236.000	1 Dokumen	1.236.000	1 Dokumen	1.236.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai regulasi**	**2 Laporan**	**2 Laporan**	**2.000.000**	**2 Laporan**	**2.000.000**	**2 Laporan**	**2.000.000**	**2 Laporan**	**2.000.000**	**2 Laporan**	**2.000.000**	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	1.000.000	4 Laporan	1.000.000	4 Laporan	1.000.000	4 Laporan	1.000.000	4 Laporan	1.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi**	**3 Laporan**	**3 Laporan**	**1.750.000**	**3 Laporan**	**1.750.000**	**3 Laporan**	**1.750.000**	**3 Laporan**	**1.750.000**	**3 Laporan**	**1.750.000**	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket	-	0 Paket		0 Paket		0 Paket		0 Paket		
Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	25 Orang	25 Orang	750.000	25 Orang	750.000	25 Orang	750.000	25 Orang	750.000	25 Orang	750.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang	1.000.000	5 Orang	1.000.000	5 Orang	1.000.000	5 Orang	1.000.000	5 Orang	1.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi**	**8 Laporan**	**8 Laporan**	**234.003.250**	**8 Laporan**	**159.508.200**	**8 Laporan**	**159.508.200**	**8 Laporan**	**159.508.200**	**8 Laporan**	**159.508.200**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6 Paket	9 Paket	7.905.000	6 Paket	8.500.000	6 Paket	8.500.000	6 Paket	8.500.000	6 Paket	8.500.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	2.000.000	2 Paket	2.000.000	2 Paket	2.000.000	2 Paket	2.000.000	2 Paket	2.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2 Paket	2 Paket	2.000.000	2 Paket	2.000.000	2 Paket	2.000.000	2 Paket	2.000.000	2 Paket	2.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	135.024.750	12 Paket	95.369.200	12 Paket	95.369.200	12 Paket	95.369.200	12 Paket	95.369.200	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 Paket	5 Paket	30.393.500	5 Paket	16.139.000	5 Paket	16.139.000	5 Paket	16.139.000	5 Paket	16.139.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	2.640.000	2 Dokumen	2.640.000	2 Dokumen	2.640.000	2 Dokumen	2.640.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	396 Laporan	250 Laporan	52.680.000	396 Laporan	31.860.000	396 Laporan	31.860.000	396 Laporan	31.860.000	396 Laporan	31.860.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	1.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera**	**3 Laporan**	**3 Laporan**	**37.753.200**	**3 Laporan**	**27.560.000**	**3 Laporan**	**27.560.000**	**3 Laporan**	**27.560.000**	**3 Laporan**	**27.560.000**	
Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Unit	1 Unit	7.500.000	1 Unit	14.000.000	1 Unit	14.000.000	1 Unit	14.000.000	1 Unit	14.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 Unit	1 Unit	28.253.200	1 Unit	11.560.000	1 Unit	11.560.000	1 Unit	11.560.000	1 Unit	11.560.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	2.000.000	1 Unit	2.000.000	1 Unit	2.000.000	1 Unit	2.000.000	1 Unit	2.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**202.450.000**	**4 Laporan**	**203.190.000**	**4 Laporan**	**203.190.000**	**4 Laporan**	**203.190.000**	**4 Laporan**	**203.190.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	16.000.000	12 Laporan	16.500.000	12 Laporan	16.500.000	12 Laporan	16.500.000	12 Laporan	16.500.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	27.668.000	12 Laporan	25.508.000	12 Laporan	25.508.000	12 Laporan	25.508.000	12 Laporan	25.508.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	157.782.000	12 Laporan	160.182.000	12 Laporan	160.182.000	12 Laporan	160.182.000	12 Laporan	160.182.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5 Laporan**	**5 Laporan**	**166.602.750**	**5 Laporan**	**131.851.000**	**5 Laporan**	**131.851.000**	**5 Laporan**	**131.851.000**	**5 Laporan**	**131.851.000**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	95.500.000	14 Unit	80.826.000	14 Unit	80.826.000	14 Unit	80.826.000	14 Unit	80.826.000	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	3.350.000	4 Unit	4.000.000	4 Unit	4.000.000	4 Unit	4.000.000	4 Unit	4.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	18 Unit	17.380.000	18 Unit	10.620.000	18 Unit	10.620.000	18 Unit	10.620.000	18 Unit	10.620.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	49.372.750	2 Unit	35.405.000	2 Unit	35.405.000	2 Unit	35.405.000	2 Unit	35.405.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**87,89 %**	**88,89 %**	**14.000.000**	**90,94%**	**12.550.000**	**93,85%**	**12.550.000**	**96,60%**	**12.550.000**	**100 %**	**12.550.000**	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**4.000.000**	**1 Laporan**	**2.500.000**	**1 Laporan**	**2.500.000**	**1 Laporan**	**2.500.000**	**1 Laporan**	**2.500.000**	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	6 Dokumen	2.000.000	6 Dokumen	2.500.000	6 Dokumen	2.500.000	6 Dokumen	2.500.000	6 Dokumen	2.500.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**3 Laporan**	**3 Laporan**	**6.000.000**	**3 Laporan**	**6.650.000**	**3 Laporan**	**6.650.000**	**3 Laporan**	**6.650.000**	**3 Laporan**	**6.650.000**	
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000	4 Dokumen	2.500.000	4 Dokumen	2.500.000	4 Dokumen	2.500.000	4 Dokumen	2.500.000	
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.150.000	4 Laporan	2.150.000	4 Laporan	2.150.000	4 Laporan	2.150.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	6 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**2 Laporan**	**2 Laporan**	**6.000.000**	**2 Laporan**	**3.400.000**	**2 Laporan**	**3.400.000**	**2 Laporan**	**3.400.000**	**2 Laporan**	**3.400.000**	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilkasanakan	4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000	4 Dokumen	2.000.000	4 Dokumen	2.000.000	4 Dokumen	2.000.000	4 Dokumen	2.000.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	4.000.000	12 Laporan	1.400.000	12 Laporan	1.400.000	12 Laporan	1.400.000	12 Laporan	1.400.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**96 %**	**97,2%**	**53.000.000**	**98,10%**	**32.557.400**	**98,10%**	**32.557.400**	**98,40%**	**32.557.400**	**100 %**	**32.557.400**	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**3 Laporan**	**3 Laporan**	**50.000.000**	**3 Laporan**	**32.577.400**	**3 Laporan**	**32.577.400**	**3 Laporan**	**32.577.400**	**3 Laporan**	**32.577.400**	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	31.500.000	10 Lembaga Kemasyarakatan	19.377.400	10 Lembaga Kemasyarakatan	19.377.400	10 Lembaga Kemasyarakatan	19.377.400	10 Lembaga Kemasyarakatan	19.377.400	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah KerjaKecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah KerjaKecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000	1 Dokumen	2.100.000	1 Dokumen	2.100.000	1 Dokumen	2.100.000	1 Dokumen	2.100.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	11.100.000	12 Laporan	11.100.000	12 Laporan	11.100.000	12 Laporan	11.100.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum**	**100 %**	**100 %**	**17.000.000**	**100 %**	**9.172.600**	**100 %**	**9.172.600**	**100 %**	**9.172.600**	**100 %**	**9.172.600**	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**10.000.000**	**1 Laporan**	**7.172.600**	**1 Laporan**	**7.172.600**	**1 Laporan**	**7.172.600**	**1 Laporan**	**7.172.600**	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2 Laporan	10.000.000	1 Laporan	7.172.600	1 Laporan	7.172.600	1 Laporan	7.172.600	1 Laporan	7.172.600	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**7.000.000**	**1 Laporan**	**2.000.000**	**1 Laporan**	**2.000.000**	**1 Laporan**	**2.000.000**	**1 Laporan**	**2.000.000**	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan	2 Laporan	2 Laporan	7.000.000	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	2.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
	dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia												
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama**	**100 %**	**100 %**	**58.868.000**	**100 %**	**48.928.000**	**100 %**	**48.928.000**	**100 %**	**48.928.000**	**100 %**	**48.928.000**	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan UmumSesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan UmumSesuai Penugasan Kepala Daerah**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	58.868.000	**4 Laporan**	48.928.000	**4 Laporan**	48.928.000	**4 Laporan**	48.928.000	**4 Laporan**	48.928.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka MemantapkanPengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti PembinaanWawasanKebangsaan dan Ketahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Orang	150 Orang	48.218.000	150 Orang	40.600.000	150 Orang	40.600.000	150 Orang	40.600.000	150 Orang	40.600.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	16 Orang	16 Orang	2.000.000	16 Orang	1.000.000	16 Orang	1.000.000	16 Orang	1.000.000	16 Orang	1.000.000	
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang ditangani Sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen	6.650.000	3 Dokumen	6.328.000	3 Dokumen	6.328.000	3 Dokumen	6.328.000	3 Dokumen	6.328.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa**	**84,50 %**	**88,89 %**	**80.000.000**	**90,98%**	**23.784.000**	**93,87%**	**23.784.000**	**95,80%**	**23.784.000**	**100 %**	**23.784.000**	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**8 Laporan**	**8 Laporan**	**80.000.000**	**8 Laporan**	**23.784.000**	**8 Laporan**	**23.784.000**	**8 Laporan**	**23.784.000**	**8 Laporan**	**23.784.000**	
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan dalam rangka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16 Dokumen	16 Dokumen	9.000.000	16 Dokumen	4.784.000	16 Dokumen	3.784.000	16 Dokumen	4.784.000	16 Dokumen	3.784.000	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 Dokumen	16 Dokumen	7.000.000	16 Dokumen	2.000.000	16 Dokumen	2.000.000	16 Dokumen	2.000.000	16 Dokumen	2.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 Dokumen	16 Dokumen	9.000.000	16 Dokumen	3.000.000	16 Dokumen	3.000.000	16 Dokumen	3.000.000	16 Dokumen	2.000.000	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	16 Dokumen	16 Dokumen	2.000.000	16 Dokumen	2.000.000	16 Dokumen	2.000.000	16 Dokumen	2.000.000	16 Dokumen	2.000.000	
Faslitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pelaksanan pemilihan kepala desa	13 Dokumen	13 Dokumen	25.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	0	2 Dokumen	4000000	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	16 Dokumen	16 Dokumen	9.000.000	16 Dokumen	2.000.000	16 Dokumen	2.000.000	16 Dokumen	2.000.000	16 Dokumen	2.000.000	
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	16 Dokumen	16 Dokumen	5.000.000	16 Dokumen	3.000.000	16 Dokumen	3.000.000	16 Dokumen	3.000.000	16 Dokumen	2.000.000	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	16 Dokumen	16 Dokumen	4.000.000	16 Dokumen	3.000.000	16 Dokumen	2.000.000	16 Dokumen	3.000.000	16 Dokumen	2.000.000	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangun Partisipatif	16 Dokumen	16 Dokumen	4.000.000	16 Dokumen	2.000.000	16 Dokumen	2.000.000	16 Dokumen	2.000.000	16 Dokumen	2.000.000	
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	16 Dokumen	16 Dokumen	6.000.000	16 Dokumen	2.000.000	16 Dokumen	2.000.000	16 Dokumen	2.000.000	16 Dokumen	2.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kecamatan Ampelgading sudah menerapkan penganggaran berbasis pengarusutamaan gender, pada kegiatan Musrenbang Kecamatan, dimana perwakilan kelompok perempuan menjadi salah satu komponen peserta. Pengarusutamaan gender diterapkan juga dalam fasilitasi lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yaitu fasilitasi kepada PKK dan Posyandu.

Selain menentukan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan, langkah selanjutnya yaitu menentukan target pencapaian indikator kinerja terkait SDGs, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang secara berturut – turut disajikan pada tabel di bawah ini. Namun karena Kecamatan Ampelgading tidak memiliki keempat indikator tersebut, maka disampaikan Nihil sesuai tabel di bawah.

Tabel 4.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Berdasarkan SDGs

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2	**NIHIL**							
3								
dst								

Tabel 4.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2	**NIHIL**							
3								
dst								

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2	**NIHIL**							
3								
dst								

Tabel 4.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2	**NIHIL**							
3								
dst								

Dalam rangka pengembangan SDM untuk mendukung kelancaran pelayanan kinerja, Kecamatan Ampelgading telah menyusun Rencana Aksi Daerah Sumber Daya Manusia (RAD SDM) sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.7
RAD SDM Kecamatan Ampelgading Tahun 2021-2026Tabel 6.6
RAD SDM Kecamatan Ampelgading Tahun 2021-2026

No.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026		
				Target	Anggaran	Peserta	Target	Anggaran	Peserta	Target	Anggaran	Peserta	Target	Anggaran	Peserta	Target	Anggaran	Peserta	Target	Anggaran	Peserta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		21	22
1	Sosialiasai Peraturan Perundang Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang		0		50	7.500.000		50	7.500.000		50	7.500.000		50	7.500.000		**50**	**7.500.000**	
2	Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	Jumlah pesrta pembinaan uraian tugas kepala desa dan perangkat desa	Orang/kegiatan	32/6	8.500.000		32/6	10.500.000		32/6	10.500.000		32/6	10.500.000		55	10.500.000			**10.500.000**	
3	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD	Jumlah peseta pembinaan uraitan tugas dan fungsi BPD	Orang/kegiatan		6.000.000			8.000.000			8.000.000			8.000.000					**2**		
4	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah linmas yang mengikuti pelatihan	orang	192	35.505.000		96	17.500.000		96	17.500.000		96	17.500.000		96	17.500.000		**100**	17.500.000	
5	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pe,mberdayaan masyarakat desa	Jumlah yang mengikuti kegiatan pemberdayaan desa	orang	50/3	8.500.000		50/3	9.500.000		50/3	9.500.000		50	9.500.000		50		18	18/14	3.370.900	18

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Renstra Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif. Renstra dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ampelgading untuk kurun waktu lima tahun.

Pencapaian target indikator kinerja Renstra Kecamatan Ampelgading merupakan serangkaian pencapaian indikator kinerja utama perangkat daerah serta program prioritas yang termuat dalam Renstra ini. Dalam pelaksanaannya mempertimbangkan seluruh potensi dan kapasitas yang tersedia baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat yang secara sinergis bersama untuk mencapai tujuan perangkat daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Kaidah pelaksanaan yang perlu diatur dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat, Seksi dan jabatan fungsional pada Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang agar mendukung pencapaian target-target Renstra Tahun 2025-2029 dan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum Renstra Kecamatan Ampelgading dengan sebaik-baiknya.
2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di

https://jdih.pemalangkab.go.id

tingkat nasional, tingkat Provinsi Jawa Tengah dan atau perubahan kebijakan Kabupaten Pemalang, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Masa berlaku Renstra Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sesuai dengan masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029. Pada saat Renstra Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2030-2034 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan, maka Renstra Tahun 2025-2029 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang tahun 2030.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029. Disadari bahwa dalam penyusunan rencana strategis ini jauh dari sempurna dan masih memiliki keterbatasan-keterbatasan, sebagaimana dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Ampelgading ini.

Ampelgading September 2025

CAMAT AMPELGADING

PRASETYO WIDYATMOKO, S.IP
Pembina Tk.I
NIP. 19690318 199802 1 012

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 merupakan langkah penting dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Renstra ini disusun dengan tujuan untuk memberikan arah yang jelas bagi pembangunan kecamatan, sekaligus memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan relevan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang ada di tingkat kecamatan

Berdasarkan pasal 221 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Dengan terlayaninya berbagai kebutuhan administrasi masyarakat diharapkan dapat memperlancar berbagai urusan masyarakat. Kecamatan juga melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sehingga pemerintahan desa dapat lebih optimal dalam memajukan desanya dan mensejahterakan masyarakatnya. Agar tujuan tersebut dapat tercapai harus didukung oleh perencanaan yang baik sehingga perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

Kecamatan Bodeh sebagai salah satu Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategi (Renstra). Penyusunan Renstra Kecamatan Bodeh sebagai bentuk penjabaran

https://jdih.pemalangkab.go.id

operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kecamatan Bodeh disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kementerian dan Renstra PD Kabupaten Pemalang yang terkait.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Bodeh untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Bodeh serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Renstra menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Bodeh selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan pelayanan publik yang baik dan mewujudkan masyarakat desa/kelurahan yang aktif.

Penyusunan Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Kecamatan Bodeh, dimana kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Bodeh harus mendukung kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai.

Proses penyusunan Renstra meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1) Persiapan Penyusunan Renstra PD, terdiri dari pembentukan tim penyusun Renstra PD, orientasi mengenai Renstra PD, agenda kerja tim penyusun Renstra PD, penyiapan data dan informasi; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD;

https://jdih.pemalangkab.go.id

(3) Penyusunan Rancangan Renstra PD; (4) Forum Perangkat Daerah; (5) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD; dan (6) Penetapan Renstra PD.

Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 disajikan dalam bagan berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029

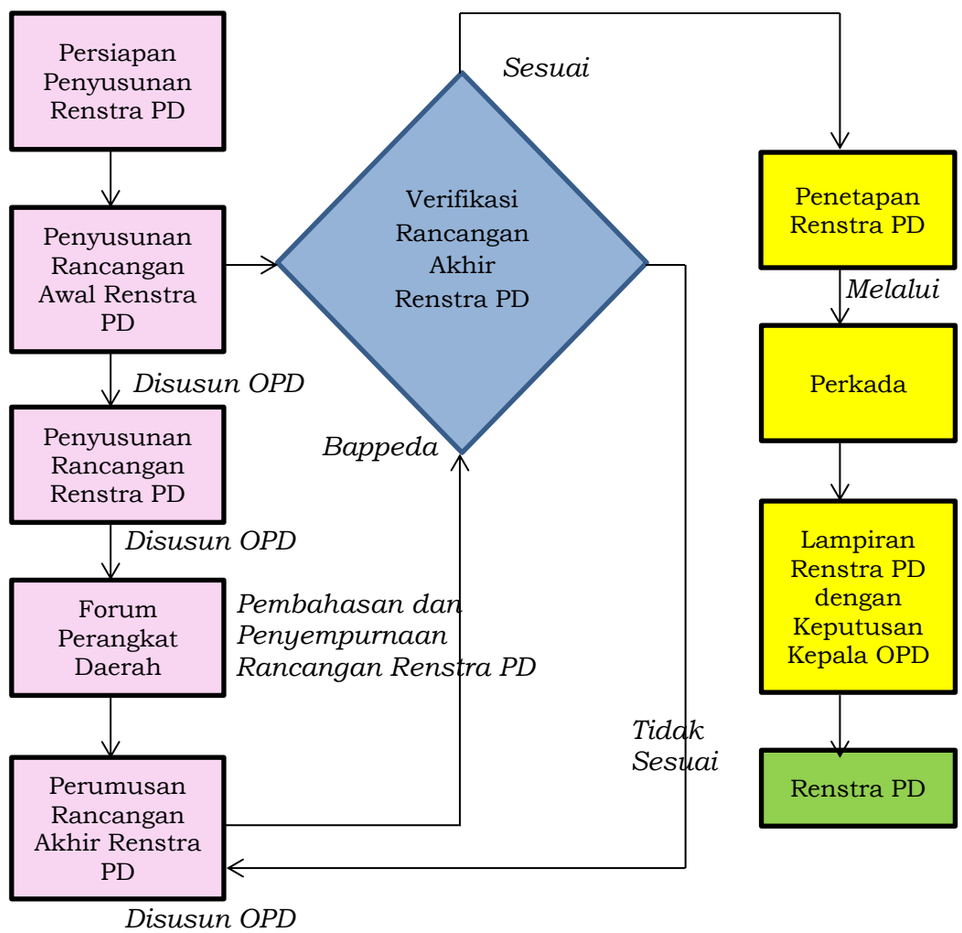

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dokumen Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang. Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Gambar 1.2
Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

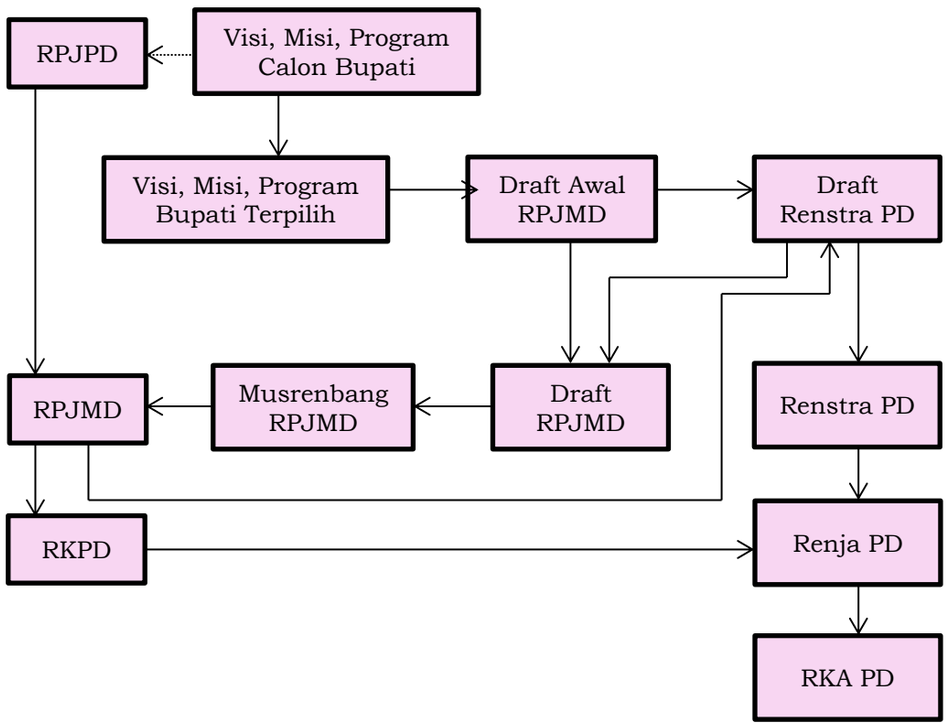

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

https://jdih.pemalangkab.go.id

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

https://jdih.pemalangkab.go.id

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1313);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20217 Nomor 1419);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

https://jdih.pemalangkab.go.id

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ...);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2050 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang; (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

https://jdih.pemalangkab.go.id

Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 7);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
26. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
27. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang;
28. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan **Rencana Strategis (Renstra)** kecamatan Bodeh tahun 2025-2029 memiliki maksud dan tujuan yang sangat penting dalam rangka memandu arah pembangunan di tingkat kecamatan untuk lima tahun ke depan. Renstra ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang efektif dan terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah yang lebih luas. Berikut adalah penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Tahun 2025-2029:

1.3.2. Tujuan

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan bertujuan untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang lebih terarah, terintegrasi, dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat di tingkat kecamatan. Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bodeh untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah di Unsur Kewilayahan;
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Kecamatan Bodeh serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Unsur Kewilayahan;
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Kecamatan Bodeh.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan isu strategis Kecamatan Bodeh, berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Bodeh, sumber daya Kecamatan Bodeh, kinerja pelayanan Kecamatan Bodeh, permasalahan pelayanan Kecamatan Bodeh dan isu strategis Kecamatan Bodeh.
3. Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Bodeh, berisi tujuan dan sasaran Kecamatan Bodeh yang akan dicapai serta strategi dan arah kebijakan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.
4. Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan. Berisi tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dan
5. Bab V Penutup

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB II

GAMBARAN UMUM, PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BODEH

2.1. Kondisi Geografi dan Demografi

Kecamatan Bodeh secara astronomis terletak antara 109 26'22" dan 109 32' 29" bujur timur dan antara 6 55' 07" dan 707' 10" lintang selatan berada pada ketinggian 29 meter dari permukaan laut. Kecamatan Bodeh terdiri dari 19 desa dengan posisi disebelah barat Kecamatan Kesesi dan Sragi Pekalongan sebelah utara Kecamatan Watukumpul sebelah timur Kecamatan Ampelgading dan sebelah selatan Kecamatan Comal dengan luas wilayah 88,9 KM2. Kondisi topografi berupa dataran, lereng dan lembah dengan rata rata curah hujan 198,17 mm per tahun. Adapun mata pencaharian penduduk sebagian besar disektor pertanian. Jumlah Penduduk Kecamatan Bodeh menurut Laporan Monografi Semester II per tanggal 31 Desember 2024 mencapai 66.368 jiwa yang terdiri dari laki-laki 33.732 jiwa dan perempuan 32.636 jiwa. Jumlah desa di wilayah Kecamatan Bodeh sebanyak 19 Desa dengan persebaran penduduk menurut wilayah desa sebagai berikut :

NO	DESA	JUMLAH PENDUDUK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Longkeyang	3.750	1.923	1.827
2	Jatingarang	7.301	3.705	3.596
3	Gunungbatu	1.704	863	841
4	Pasir	2.789	1.459	1.330

https://jdih.pemalangkab.go.id

5	Kwasen	789	390	408
6	Jatiroyom	3.529	1.806	1.723
7	Parunggalih	1.048	539	509
8	Payung	2.441	1.238	1.203
9	Cangak	3.648	1.896	1.778
10	Kebandungan	2.661	1.329	1.332
11	Kesesirejo	7.578	3.868	3.710
12	Babakan	2.920	1.518	1.402
13	Karangbrai	5.392	2.743	2.649
14	Jraganan	2.444	1.239	1.205
15	Kebandaran	1.848	932	916
16	Bodeh	1.817	921	896
17	Muncang	5.876	2.978	2.898
18	Kelangdepok	3.471	1.714	1.757
19	Pendowo	5.317	2.671	2.646
JUMLAH		**66.368**	**33.732**	**32.636**

Sumber : Monografi Kecamatan Bodeh 2024

2.2 Gambaran Pelayanan Kecamatan Bodeh

2.2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Bodeh

Kecamatan Bodeh dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

A. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Camat mempunyai uraian tugas :

1. Mengarahkan penyusunan dokumen perencanaan kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan organisasi, perencanaan partisipatif dan perencanaan yang lebih tinggi dan ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Merumuskan kebijakan kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Merumuskan inovasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
4. Mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan kecamatan, meliputi kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan umum dan kesekretariatan sesuai dengan tugas fungsi dan pedoman pelaksanaan agar tepat sasaran dan tujuan;
5. Mengarahkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan dengan melalui bimbingan, supervisi,

https://jdih.pemalangkab.go.id

fasilitasi dan evaluasi guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan;

6. Mengarahkan penyediaan dan pelayaan informasi publik serta penyusunan data dan informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
7. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsinya guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh PD kabupaten yang ada di kecamatan sesuai dengan petunjuk pimpinan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
9. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan Peraturan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
10. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana program,

https://jdih.pemalangkab.go.id

kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

12. Merumuskan laporan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kerja organisasi.

B. Sekretaris Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan kesekretariatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

https://jdih.pemalangkab.go.id

4. Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian sesuai dengan kebituhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
5. Mengoordinasikan penyusunan kondep inovasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
9. Melaksanakan tugas dan kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

https://jdih.pemalangkab.go.id

a. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Menyusun konsep dokumen perencanaan Kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan oprganisasi, perencanaan partisipatif, dan perencanaanyang lebih tinggi guna dirumuskan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep laporan capaian kinerja Kecamatan yang meliputi LkjIP, laporan pelaksanaan APBD dan laporan kinerja lain berdasarkan Renja dan realisasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban;
5. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman

https://jdih.pemalangkab.go.id

pengelolaan keuangan daerah guna tertib adminstrasi;

6. Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan keuangan;
7. Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi LRA, LO, LPE, neraca dan CaLK serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;
8. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
10. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kecamata sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;

https://jdih.pemalangkab.go.id

11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepasa pimpinan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai sengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengelola kegiatan administrasi surat menyurat, kepegawaian, penataan arsip, dokumentas, dan kearsipan sesuai

https://jdih.pemalangkab.go.id

dengan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;

4. Mengelola kegiatan kerumahtanggaan meliputi penyediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, pelayanan tamu dinas dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Mengelola administrasi barang milik daerah yang meliputi penyusunan analisa kebutuhan dan pemeliharaan barang, penatausahaan barang, dan penyusunan administrasi barang lainnya sesuai dengan peraturan pengelolaan barang milik daerah guna tertib administrasi;
6. Mengelola kegiatan ketatalaksanaan meliputi penyusunan standart dan prosedur kerja sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Mengelola kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi penyediaan dan pelayanan informasi publik, penyusunan data informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian, pengaturan tata tempat dan tata acara serta kegiatan kehumasan dan keprotokolan lain sesuai dengan pedoman

https://jdih.pemalangkab.go.id

pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

8. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

C. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan

https://jdih.pemalangkab.go.id

organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;

2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta, dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan memeriksa berkas yang diajukan kepala desa sebagai bahan konsultasi kepada pimpinan guna disahkan oleh pimpinan;
5. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan melalui fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, fasilitasi pemberian tunjangan perangkat desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa, dan evaluasi penyelenggaraan

https://jdih.pemalangkab.go.id

pemerintahan desa guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;

6. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Seksi Tata Pemerintahan meliputi data monografi desa, data perangkat desa dan data terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
8. Menyusun konsep motivasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

D. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, keagamaan, pembinaan kesehatan, keluarga berencana, organisasi perempuan, pendidikan, pemuda dan olahraga dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan sosial desa melalui fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan

https://jdih.pemalangkab.go.id

dengan pembangunan desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjaama desa dengan pihak ketiga, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, koordinasi pendampingan desa, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial guna tertib administrasi dan kelancaran dan penyelenggaraan pemerintahan desa;

5. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dengan melibatkan stakeholder terkait demi tercapainya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran;
6. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;

https://jdih.pemalangkab.go.id

8. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan dan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawabkan kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

E. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai

https://jdih.pemalangkab.go.id

dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan meliputi fasilitasi pengaduan masyarakat, kejadian musibag, bencana umum atau kejadian luar biasa lainnya serta upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lainnya dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan pemuka agama/tokoh masyarakat serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau desa/kelurahan serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna tegaknya peraturan;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah yang ada di wilayah kecamatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dan/atau swasta dan/atau pihak terkait

https://jdih.pemalangkab.go.id

lainnya sesuai dengan prosesur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keamanan dan terpeliharanya prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah;

6. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan yang bergerak di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
7. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kebutuhan informasi publik;
9. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana program, kegiatan dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

F. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan kegiatan koordinasi terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan dan kabupaten, pemerintah desa/kelurahan, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;

https://jdih.pemalangkab.go.id

4. Menyusun konsep rencana operasional dan standar pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
5. Melaksanakan kegiatan fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan di bidang perizinan, non perizinan, administrasi pertanahan dan pelayanan administrasi lainnya sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dan pemeriksaan dokumen/berkas permohonan, cek lokasi apabila disyaratkan, pengesahan hingga penyampaian kembali dokumen/berkas kepada pemohon guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
6. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan prosedur dan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
7. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tercapainya kepuasan masyarakat;
8. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;

https://jdih.pemalangkab.go.id

9. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
10. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Bodeh mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kecamatan Bodeh

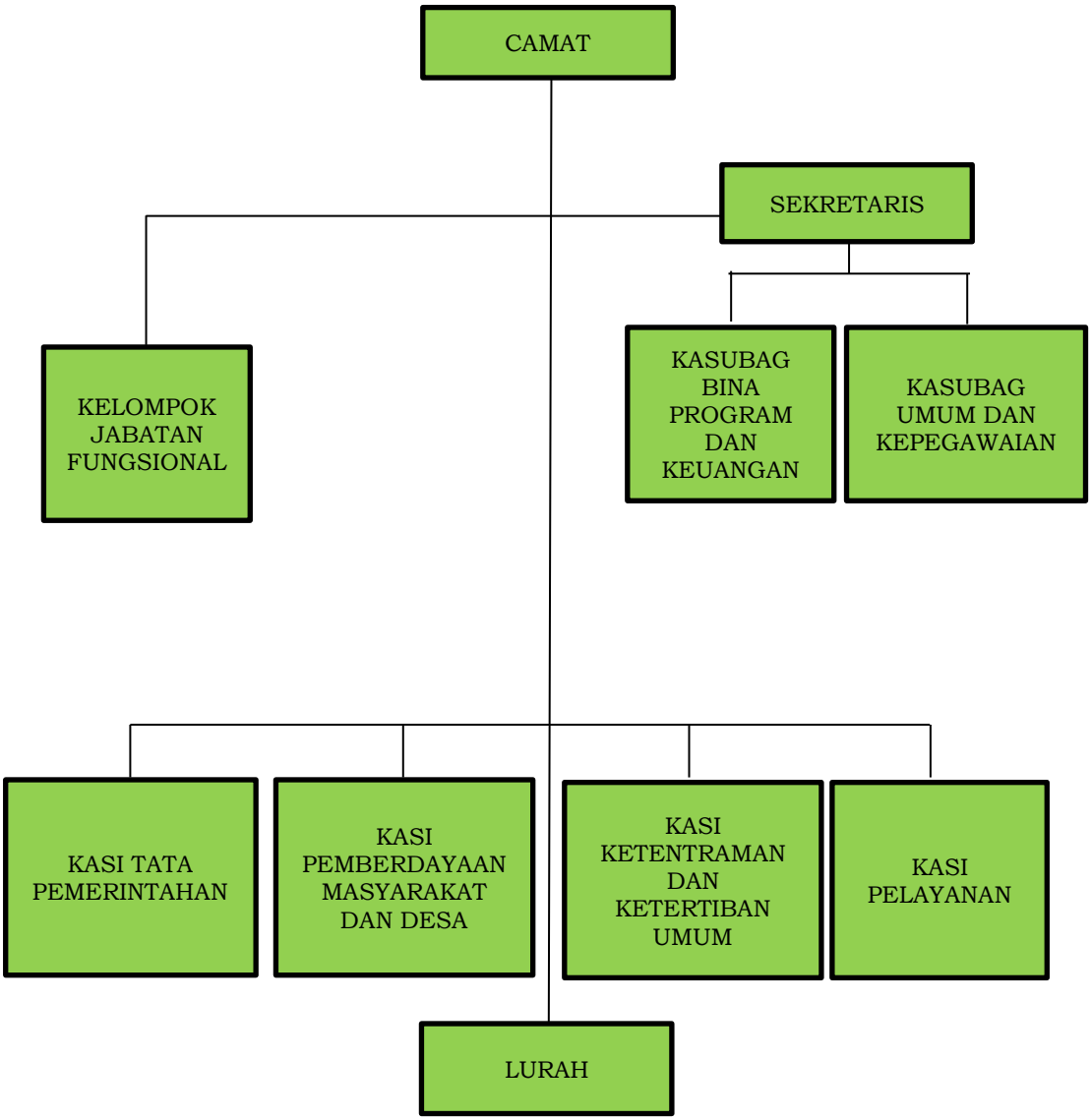

Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Bodeh

Sumber daya Kecamatan Bodeh sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

a. Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

https://jdih.pemalangkab.go.id

Jumlah pegawai di Kecamatan Bodeh dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyakatan sosial tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.

Pegawai Kecamatan Bodeh

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Golongan				Jumlah
				I	II	III	IV	
1	Camat	1	0	0	0	0	1	1
2	Sekcam	0	1	0	0	0	1	1
3	Kasubag	2	0	0	0	2	0	2
4	Kasi Kecamatan	3	1	0	0	4	0	4
5	JFU Kecamatan	7	2	2	3	4	0	9
6	JFT Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0
7	Non ASN Kecamatan	9	2	0	0	0	0	11
Jumlah		22	6	2	3	10	2	28

Sumber : Sekretariat Kecamatan Bodeh, 2025

Pegawai Kecamatan Bodeh berjumlah 28 orang, meliputi 22 orang laki-laki dan 6 orang perempuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Bodeh dominan laki-laki yaitu sebanyak 78,5 %. Agar kecamatan Bodeh menerapkan responsif gender, untuk perekrutan tenaga non ASN selanjutnya disarankan berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya jumlah pegawai ASN berdasar golongan, dari 17 orang, Golongan I sebanyak 2 orang, golongan II sebanyak 3 orang, golongan III sebanyak 10 orang dan golongan IV sebanyak 2 orang, sehingga dapat

https://jdih.pemalangkab.go.id

disimpulkan bahwa pegawai ASN pada Kecamatan Bodeh didominasi oleh ASN Golongan III sebanyak 59 %

Tabel 2.2.

Data Pegawai Berdasar Diklat Kepemimpinan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Diklatpim III	1	1	0
2	Diklatpim IV	1	0	1
3	ADUM	1	1	0
4	SEPADA	0	0	0
5	Struktural yang belum diklat	6	5	1
Jumlah		9	7	2

Sumber : Sekretariat Kecamatan Bodeh 2025

Jumlah pegawai berdasarkan diklat kepemimpinan pada Kecamatan Bodeh, yaitu 1 orang sudah mengikuti Diklatpim III, 1 orang sudah mengikuti Diklatpim IV dan 1 orang sudah menggikuti ADUM sedangkan Pejabat Struktural pada Kecamatan Bodeh yang belum mengikuti diklat sebanyak 6 orang.

Tabel 2.3.

Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
I	PNS			
1	Pasca Sarjana (S2)	-	-	-
2	Sarjana (S1)	14	11	3
3	Diploma	-	-	-
4	SLTA	1	1	-
5	SLTP	-	-	-
6	SD	2	2	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

II	NON PNS			
1	Pasca Sarjana (S2)	-	-	-
2	Sarjana (S1)	4	3	1
3	Diploma	-	-	-
4	SLTA	3	2	1
5	SLTP	2	2	-
6	SD	1	1	-

Sumber : Sekretariat Kecamatan Bodeh, 2025

Jumlah pegawai Kecamatan Bodeh baik yang ASN maupun Non ASN berdasar tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S2) sebanyak 0 orang, Sarjana (S1) sebanyak 18 orang, Diploma sebanyak 0 orang, SLTA sebanyak 4 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara kualitas SDM di Kecamatan Bodeh sudah tercukupi, yaitu dengan dominansi berpendidikan S1 sebanyak 64 %.

Tabel 2.4.

Data Pegawai Berdasar Tingkat Eselon

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	IIIA	1	1	-
2	IIIB	1	-	1
3	IVA	4	3	1
4	IVB	2	2	-
Jumlah		8	6	2

Sumber : Sekretariat Kecamatan Bodeh., 2025

Jumlah pegawai Kecamatan Bodeh berdasarkan tingkat eselon, yaitu Eselon IIIA sebanyak 1 orang, Eselon IIIB sebanyak 1 orang, Eselon IVA sebanyak 4 orang, Eselon IVB sebanyak 2 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kecamatan Bodeh berdasarkan tingkat eselon sudah merata.

a. Sarana dan Prasarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Kecamatan Bodeh dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6.

Inventaris Aset Kecamatan Bodeh

No	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Jumlah Harga (Rp)
1	**01**		**Tanah**		**Baik**	**Sedang**	**Rusak**	**292.400.000**
		01	**Tanah**					**292.400.000**
		01.11	Tanah Untuk Bangunan Gedung	1	1			241.500.000
		01.13	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	1	1			50.900.000
			Jumlah KIB A					
2	**02**		**Peralatan dan Mesin**					**1.291.772.776**
		03.01	**Alat-alat Angkutan**					**523.825.032**
		03.01.01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2	2			350.126.428

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Jumlah Harga (Rp)
		03.01.05	Kendaraan Bermotor Roda Dua	12	12			173.698.604
		06	**Alat Kantor & Rumah Tangga**					
		06.01	**Alat Kantor**					**86.409.852**
		06.01.04	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	27	27			66.169.700
		06.01.05	Alat Kantor Lainnya	5	4	1		20.240.152
		06.02	**Alat Rumah Tangga**					**263.852.100**
		06.02.01	Meubeler	130	120		5	129.450.000
		06.02.04	Alat Pendingin	20	20			64.770.901
		06.02.05	Alat Dapur	2	2			882.500
		06.02.06	Alat Rumah Tangga Lainnya	14	14			63.798.699
		06.03	**Peralatan Komputer**					**68.759.374**
		06.03.02	Personal Komputer	21	8	5	9	163.771.535
		06.03.04	Peralatan Mini Komputer	3	2		1	16.736.000
		06.03.05	Peralatan Personal Komputer	15	8		7	50.873.374
		06.03.06	Peralatan Jaringan	1			1	1.150.000
		06.04	**Meja dan Kursi Kerja atau Rapat Pejabat**					**24.190.000**
		06.04.01	Meja Kerja Pejabat	5	5			8.000.000
		06.04.03	Kursi Kerja Pejabat	16	16			20.667.200
	02	**07**	**Alat Studio & Alat**					**29.062.871**

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Jumlah Harga (Rp)
			Komunikasi					
		07.01	**Alat Studio**	**3**	**3**			**6.689.600**
		07.01.02	**Alat Komunikasi**	**2**	**2**			**5.571.571**
		07.02.03	Alat Komunikasi Radio HF/FM	1			1	1.000.000
		07.02.06	Alat Komunikasi Sosial	1			1	4.571.571
			Jumlah KIB B					
3	**03**		**Gedung dan Bangunan**					**736.095.249**
		11	**Bangunan Gedung**					**736.095.249**
		11.01	**Bangunan Gedung Tempat Kerja**					**636.175.249**
		11.01.01	Bangunan Gedung Kantor	1	1			489.255.149
		11.01.09	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1	1			132.008.700
		11.01.14	Bangunan Gedung Garasi atau Pool	1	1			14.911.400
		11.02	**Bangunan Gedung Tempat Tinggal**					**99.920.000**
		11.02.01	Rumah Negara Golongan II	1	1			99.920.000
			Jumlah KIB D					
4	**05**		**Aset Tetap Lainnya**					**0**
		17	**Buku dan Perpustakaan**					**0**
		18	**Barang Bercorak Kebudayaan**					**0**

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Jumlah Harga (Rp)
		18.01.02	Lukisan	1			1	
		18.01.05	Tanda Penghargaan	21			21	
		18.01.06	Maket dan Foto Dokumen	2			2	
5	**07**		**Aset Lainnya**					**87.357.500**
		07.21	Aset Kondisi Rusak Berat / Hilang / Lainnya	63	63			87.357.500
JUMLAH ASET								**2.326.298.025**

Sumber : Sekretariat Kecamatan Bodeh 2025

Berdasar tabel 2.6, sarana dan prasarana perkantoran yang dimiliki oleh Kecamatan Bodeh sudah cukup dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Administrasi Kewilayahan

Terdapat 19 desa di Kecamatan Bodeh dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.7.

Administrasi Kewilayahan Kecamatan Bodeh

No	Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RT	Jumlah RW	Jumlah Perangkat Desa	Jumlah Linmas	Ket
1	Longkeyang	5	20	5	20	20	
2	Jatingarang	5	26	13	49	42	
3	Gunungbatu	4	8	2	15	15	
4	Pasir	3	16	8	10	10	
5	Kwasen	2	5	2	12	12	
6	Jatiroyom	5	13	5	24	22	
7	Parunggalih	2	4	2	12	12	
8	Payung	3	10	3	21	20	

https://jdih.pemalangkab.go.id

9	Cangak	3	17	2	33	32	
10	Kebandungan	2	14	4	30	40	
11	Kesesirejo	5	32	6	38	38	
12	Babakan	2	16	4	20	18	
13	Karangbrai	5	17	5	18	18	
14	Jraganan	3	12	3	18	18	
15	Kebandaran	2	6	2	31	30	
16	Bodeh	2	7	2	30	30	
17	Muncang	4	36	4	30	30	
18	Kelangdepok	4	18	4	20	20	
19	Pendowo	3	33	6	30	30	
Jumlah		64	310	82	461	457	

Sumber : Sekretariat Kecamatan Bodeh, 2025

Kecamatan Bodeh terdiri dari 19 desa, 82 RW dan 310 RT. Untuk menjaga ketentraman dan ketertiban wilayah, Kecamatan didukung oleh 457 personil Linmas

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bodeh

Kinerja pelayanan Kecamatan Bodeh bisa dilihat pada tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Gambaran kinerja pelayanan Kecamatan Bodeh Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.8.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks				36,5	37,5	38	39	39,5	31,66	40,69	NA	NA	NA	86,73	108,5	NA	NA	NA
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Intasi Pemerintah	Nilai				37,5	38,5	39	40	40,5	39,65	48,9	54,85	61,41	NA	105,7	127	140,64	153.52	NA
	Cakupan Layanan Kecamatan					87,62	88,77	89,92	90,02	92,23	NA	88,77	89,99	91,58	NA	NA	100	100	101,73	NA
3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan					77,85	78,1	78,25	78,85	79	77,85	79,99	80,53	81,99	NA	100	102,41	102,91	103,98	NA
4	Persentase pelayanan publik yang tersedia	%				85	85	85	85	85	80	80	80	80	NA	94,11	94,11	94,11	94,11	NA
5	Persentase masyarakat desa yang aktif	%				84,67	85,17	85,67	86,17	86,67	86	89	91	93,67	NA	101,53	100	103,88	104.99	NA
6	Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	NA	100	100	100	100	NA
7	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	NA	100	100	100	100	NA
8	Persentase Desa bertata kelola Pemerintahan baik	%				68,42	73,68	78,95	78,95	89,47	78,95	78,95	84,22	84,22	NA	115,34	107,15	106,67	94,13	NA

Sumber : Kecamatan Bodeh, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

Berdasarkan tabel 2.8. dapat diketahui pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bodeh selama tahun 2021-2025 sebagai berikut :

1. Melebihi target, meliputi :
   - Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2022
   - Nilai Sakip tahun 2021- 2024.
   - Cakupan Layanan Kecamatan tahun 2022-2024.
   - Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2021-2024.
   - Persentase Masyarakat Desa yang aktif tahun 2021- 2024.
   - Persentase desa bertata pemerintahan yang baik tahun 2021- 2023.

   Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :

   a. Komitmen dari semua pihak;
   b. Sarana dan prasarana yang memadai;
   c. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM;
   d. Komunikasi dan koordinasi yang intens antar instansi.

2. Memenuhi target, meliputi :
   - Cakupan layanan kecamatan tahun 2022-2023.
   - Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan tahun 2021.
   - Persentase masyarakat desa yang aktif tahun 2022.

https://jdih.pemalangkab.go.id

- Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan tahun 2021-2024.
- Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani tahun 2021-2024

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :

a. Komitmen dari semua pihak;
b. Sarana dan prasarana yang memadai;
c. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM;
d. Komunikasi dan koordinasi yang intens antar instansi

3. Tidak memenuhi target, meliputi :

- IRB tahun 2021.
- Persentase pelayanan publik yang tersedia tahun 2021- 2024.
- Persentase Desa bertata kelola Pemerintahan baik tahun 2024

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak memenuhi target antara lain :

a. Masih kurangnya SDM yang potensial baik di tingkat desa maupun kecamatan.
b. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.9.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bodeh Kabupaten

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	Nilai RB		35,87	31,66	40,69	NA	NA
	Nilai SAKIP		36,33	39,65	48,9	54,85	61,41
1	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	%	100	100	100	100	100
2	Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	%	NA	66,67	63,33	70,73	87,72
3	Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan	%	86	86	89	91	93,67
4	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi	%	83,33	83,33	83,33	83,33	96
5	Persentase jalan kewenangan kelurahan kondisi baik	%	-	-	-	-	-
6	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	%	100	100	100	100	100
7	Jumlah potensi konflik	kasus	0	0	0	0	0
8	Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik	%	84	84	85	79,96	84,22

Sumber : Kecamatan Bodeh, 2024

https://jdih.pemalangkab.go.id

Persentase capaian PBB Kecamatan Bodeh selama kurun waktu tahun 2021-2025 cenderung meningkat yaitu sebesar ..... pada tahun 2021 menjadi sebesar ..... pada tahun 2024. Hal ini disebabkan adanya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB, sehingga kemampuan membayar PBB juga meningkat.

Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani selama kurun waktu tahun 2021-2025 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada pengaduan masyarakat di kecamatan dapat ditangani dengan baik dan tepat waktu.

Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2021-2025 cenderung meningkat, yaitu sebesar 38% pada tahun 2021 menjadi sebesar 87,72% pada tahun 2024. Hal tersebut disebabkan adanya dukungan sumber daya manusia, tersedianya anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas serta adanya dukungan dari PD terkait.

Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2021-2025 cenderung meningkat, yaitu sebesar 90% pada tahun 2021 menjadi sebesar 98% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa ada kepedulian tinggi dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan melalui

https://jdih.pemalangkab.go.id

musyawarah perencanaan pembangunan yang diselenggarakan mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai kecamatan.

Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD) yang dibina selama kurun waktu tahun 2021-2025 cenderung meningkat, yaitu sebesar 48% pada tahun 2021 menjadi sebesar 75% pada tahun 2024. LKD yang dibina yaitu RW, PKK, karang taruna, Posyandu, LPMD/K dan RT.

Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi selama kurun waktu tahun 2021-2025 cenderung meningkat, yaitu sebesar 35% pada tahun 2021 menjadi sebesar 50% pada tahun 2024. LKD merupakan mitra kecamatan dalam pembangunan kecamatan sehingga perlu untuk difasilitasi kegiatannya.

Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani selama kurun waktu tahun 2021-2025 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada gangguan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan dapat ditangani dengan baik.

Jumlah potensi konflik selama kurun waktu tahun 2021-2025 yaitu 0. Potensi konflik yang hampir terjadi dikarenakan antar desa akibat adanya perbedaan pendapat dan kesalahpahaman. Namun, potensi konflik yang

https://jdih.pemalangkab.go.id

terjadi tersebut dapat segera diselesaikan dengan baik lewat koordinasi di tingkat kecamatan.

Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik dalam kurun waktu tahun 2021-2025 cenderung meningkat, yaitu sebesar 78,95 % pada tahun 2021 menjadi sebesar 84,22% pada tahun 2024. Meskipun meningkat capaian tersebut masih jauh dari target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya kendala yang terjadi di kecamatan, mulai dari kurang siapnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas serta kurangnya dukungan dari PD terkait.

Selain indikator pada Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2021-2025 dan pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 terdapat pula indikator kinerja berdasar SDG's, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021. Namun, untuk Kecamatan Pemalang tidak terdapat indikator kinerja dari ketiga regulasi tersebut sehingga ditulis NIHIL.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.8. c

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Berdasarkan SDGs

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2	**NIHIL**					
3						

Sumber : Kecamatan Bodeh, 2025

Tabel 2.8. d

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2	**NIHIL**					
3						

Sumber : Kecamatan Bodeh, 2025

Tabel 2.8. e

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						

https://jdih.pemalangkab.go.id

2	**NIHIL**					
3						

Sumber : Kecamatan Bodeh, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.9.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang

Uraian	Anggaran Pada Tahun (dalam juta)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (dalam juta)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (dalam juta)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.335,78	3.187,559	2.856,638	3.212,282	3.377,902	2.855,2699	2.937,404	2.771,061	3.063,8		85,6	92,15	97	95,38			
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	34,095	26	3,5	4	4	21,824	25,980	3,492	4		51,3	99,92	99,7	100			
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	93,272	55,300	34,62	45,8	46,724	47,853	55,27	45,8	47		51,3	99,95	100	100			
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	0	8	0	0	0	0	8	0	0		0	100	0	0			
Program Penyelenggaraan Urusan	0	62,34	39,36	41,074	28,683	0	62,335	39,2	41,074		0	99,9	99,59	100			

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pemerintahan Umum																	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	120,083	28	10,111	14,9	9,918	43,8145	54	10,111	14,9		36,48	99,25	100	100			
Jumlah	3.583,23	3.367,199	2.944,2295	3.318,056	3.467,227	2.968,7614	3.116,779,407	2.858,485853	3.169,574899		82,85	92,56	97,09	95,53			
Rata-rata																	

Sumber : Kecamatan Bodeh, 2024

Berdasar tabel 2.9, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu tahun 2021-2025 rasio antara realisasi dan anggaran Kecamatan Bodeh cenderung meningkat, yaitu dengan rata-rata sebesar 79,34% pada tahun 2021 menjadi sebesar 98,96 % pada tahun 2024. Hal ini berarti dana yang sudah dianggarkan dapat terserap secara optimal untuk pelaksanaan pelayanan Kecamatan Bodeh. Besaran anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Bodeh selama kurun waktu tahun 2021-2025 cenderung menurun rata-rata penurunan sebesar 2%. Besaran realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2021-2025 juga cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 8,%. Penurunan anggaran menjadi salah satu kendala tercapainya target kinerja pelayanan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam melaksanakan pelayanan, yang menjadi sasaran layanan adalah masyarakat secara umum, lembaga kemasyarakan dan desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Bodeh

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Bodeh

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bodeh

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik Kecamatan Bodeh tidak lepas dari permasalahan yang timbul selama berjalannya waktu. Permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan, salah satunya adalah aspek pelayanan publik, ditandai dengan indeks pelayanan publik tahun 2023 yang masih rendah. Di Kecamatan Bodeh pelayanan publik masih kurang optimal yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor sarana prasarana, sumber daya manusia dan teknologi.
2. Belum optimalnya integrasi sistem informasi pendukung penyelenggaraan pemerintahan. Di tingkat kecamatan sistem yang ada belum sepenuhnya terintegrasi sehingga masih sering terjadi miskomunikasi dan ketidakakuratan data.
3. Perlu koordinasi dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan
4. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait tata kelola pemerintahan desa.

https://jdih.pemalangkab.go.id

5. Perlu peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan
6. Pemenuhan dan perbaikan sarpras kecamatan
7. Terlalu banyak SIM yang harus di entry di tingkat desa sementara SDM yang paham IT di tingkat desa terbatas
8. Perlu peningkatan kapasitas linmas
9. Perlu penganggaran fasilitasi lembaga kemasyarakatan selain PKK

2.2.2. Isu Strategis

Kecamatan Bodeh dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Bodeh tahun 2025-2029, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Bodeh adalah sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan;
4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa dan kecamatan;
5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan;
6. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran;
7. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Bodeh adalah sebagai berikut:

1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya PD dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa;

https://jdih.pemalangkab.go.id

3. Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan;
4. Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa dan kecamatan;
5. Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa;
6. Adanya pendampingan dari PD terkait;
7. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa depan. Hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Kecamatan Bodeh, telaah visi misi dan program prioritas Bupati, dan telaah Renstra Kemendagri/Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang yang meliputi potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi pada periode sebelumnya, dirumuskan isu strategis Kecamatan Bodeh yaitu **"Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan Bodeh".**

https://jdih.pemalangkab.go.id

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan yang dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
			Gangguan akibat cuaca ekstrem dapat mempersulit akses masyarakat ke kantor kecamatan dan pelayanan dasar, termasuk pelayanan administrasi kependudukan, koordinasi bencana, dan pengawasan wilayah.	Kondisi lingkungan yang tidak sehat dan belum tertata menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap kualitas layanan kecamatan, serta berdampak pada kesehatan masyarakat dan beban administrasi penanganannya	Minimnya akses terhadap air bersih dan sanitasi layak di beberapa desa memperburuk kualitas pelayanan kesehatan, dan memunculkan kebutuhan layanan koordinatif yang lebih responsif dari kantor kecamatan, yang belum sepenuhnya terfasilitasi oleh SDM dan sistem yang ada.	Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan Bodeh

Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan Bodeh tidak semata-mata disebabkan oleh aspek kelembagaan atau SDM, melainkan juga dipengaruhi oleh tekanan isu

https://jdih.pemalangkab.go.id

lingkungan global hingga lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya integratif dalam peningkatan kapasitas layanan publik, termasuk:

- Peningkatan ketangguhan infrastruktur pelayanan terhadap risiko iklim.
- Digitalisasi dan pemetaan layanan publik berbasis data lingkungan.
- Pemberdayaan masyarakat dalam partisipasi pengelolaan lingkungan berbasis wilayah.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Kecamatan Bodeh dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang pelayanan publik, maka Kecamatan Bodeh harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Kecamatan Bodeh secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat secara umum.

3.1. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Bodeh selama tahun 2021–2026 adalah "**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan**". Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bodeh sebagai perangkat daerah yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa yang ada di wilayahnya, serta

https://jdih.pemalangkab.go.id

melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman. Tujuan tersebut diukur dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan yang merupakan hasil survei kepuasan masyarakat.

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra
Kecamatan Bodeh

Tujuan	Indikator	Target Tahun						Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan	11	13	15	17	18	19	

3.2. Sasaran

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Bodeh dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Bodeh selama tahun 2021-2026, adalah "**Meningkatnya pelayanan kecamatan**". Sasaran tersebut diukur dengan indikator cakupan layanan kecamatan yang diperoleh dari rerata persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif, persentase gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang dapat diselesaikan, persentase potensi konflik

https://jdih.pemalangkab.go.id

tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang tertangani, serta persentase desa bertata kelola pemerintahan baik.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bodeh dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.2.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bodeh

NSPK	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan sasaran	Baseline Tahun		Target Capaian					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan		Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan	4	9	11	13	15	17	18	19
		Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Nilai SKM	80,53	81,99	86,9	87,5	88	89	89,4	89,8
			Prosentase meningkatnya jumlah Desa Mandiri	5,26	47,36	57,89	68,42	78,94	89,47	94,73	100
	SEBARAN INDIKATOR PROGRAM										
	Program Penyelenggaraan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan	Persentase pelimpahan kewenangan ke	87,72	87,72	88,89	88,89	90,94	93,85	96,60	100

https://jdih.pemalangkab.go.id

	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun								
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif			97	97,20	98,10	98,10	98,40	100
			Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan)			72	73	75	77	79	80
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani		100	100	100	100	100	100	100
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani		100	100	100	100	100	100	100
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase kesesuaian RKPDes dan RPJMDes dengan RPJMD		100	100	100	100	100	100	100

https://jdih.pemalangkab.go.id

3.3. Strategi

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Kecamatan Bodeh guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Kecamatan Bodeh dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Pemalang Bercahaya (Bersih, Cakap, Handal, Mulya)			
Misi 6 : Organisatoris (Meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi)			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	1. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan 2. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital 3. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Lokal 4. Optimalisasi Potensi Wilayah 5. Standarisasi dan Digitalisasi Layanan Publik 6. Peningkatan Kompetensi dan Etika SDM Aparatur 7. Penguatan Infrastruktur dan Sarana Layanan 8. Penguatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif 9. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan 10. Fasilitasi Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat	1. Penguatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan 2. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Publik 3. Penerapan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) 4. Penguatan Peran Serta dan Kemandirian Masyarakat 5. Digitalisasi dan Inovasi Layanan Pemerintahan 6. Sinkronisasi dan Kolaborasi Lintas Sektor 7. Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Pelayanan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel : 3.2 Tahapan Rencana Strategis

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

3.4. Arah Kebijakan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat di tingkat kecamatan, arah kebijakan pembangunan Kecamatan selama lima tahun ke depan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar yang merata, pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, dan pelestarian lingkungan hidup.

Kebijakan pembangunan Kecamatan difokuskan pada pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan berbasis data, dengan mempertimbangkan potensi wilayah serta aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui mekanisme perencanaan partisipatif seperti Musrenbang. Peran kecamatan sebagai simpul koordinasi pembangunan wilayah akan diperkuat melalui peningkatan kapasitas tata kelola, pemanfaatan teknologi informasi, serta sinergi dengan instansi vertikal, OPD di tingkat kabupaten, dan lembaga kemasyarakatan.

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan		1. Penguatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan 2. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Publik 3. Penerapan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) 4. Penguatan Peran Serta dan Kemandirian Masyarakat 5. Digitalisasi dan Inovasi Layanan Pemerintahan

https://jdih.pemalangkab.go.id

	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	6. Sinkronisasi dan Kolaborasi Lintas Sektor 7. Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Pelayanan

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bodeh yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029 :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
d. Sub Kegiatan Penyusunan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
b. Sub Kegiatan Penatausahaan barang milik daerah SKPD

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas berserta atribut kelengkapananya.
   b. Sub Kegiatan Peningkatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
   c. Sub Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
   c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

https://jdih.pemalangkab.go.id

g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
h. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
   c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

https://jdih.pemalangkab.go.id

e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
   a. Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
   b. Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
   c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
   a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
   b. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang

https://jdih.pemalangkab.go.id

dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

c. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

b. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
c. Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

F. Program Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintahan Desa

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
   b. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
   c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
   d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
   e. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
   f. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
   g. Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
   h. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

https://jdih.pemalangkab.go.id

i. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
j. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Kecamatan Bodeh selama tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

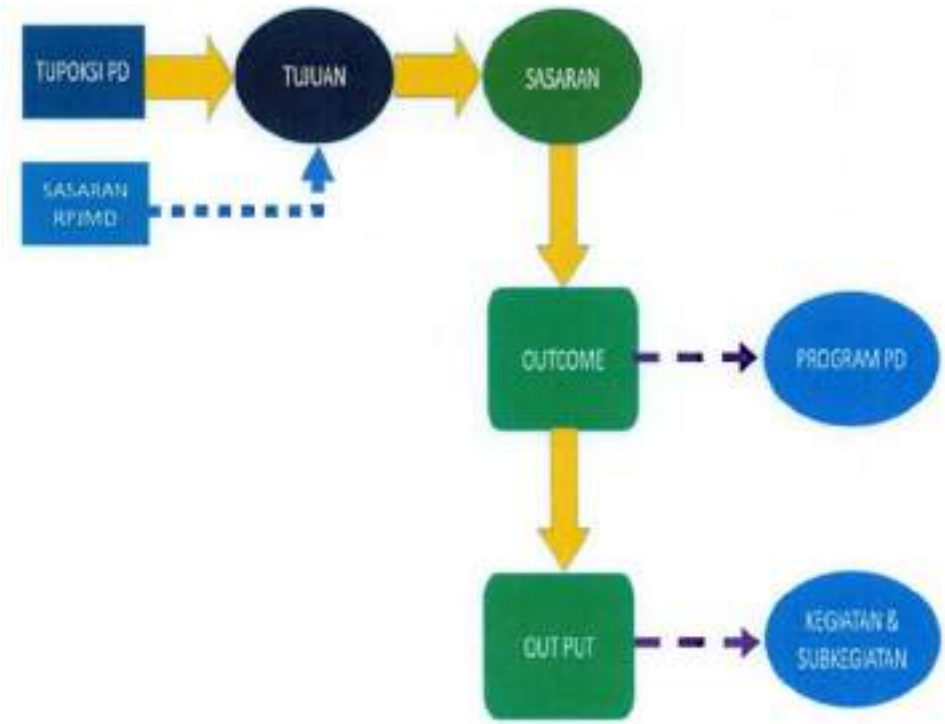

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.2. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan				Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan		
		Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai			Nilai SKM		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat					
					Prosentase meningkatnya jumlah Desa Mandiri		
			Meningkatnya kualitas penyeelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Persesntase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	
			Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan yang Efektif		Persentase efektiftas kegiatan di Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
UNSUR KEWILAYAHAN				**3.040.674.000**		**3.040.674.000**		**3.040.674.000**		**3.040.674.000**		**3.040.674.000**	
KECAMATAN ADMINISTRASI				**3.040.674.000**		**3.040.674.000**		**3.040.674.000**		**3.040.674.000**		**3.040.674.000**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				**2.882.456.000**		**2.882.456.000**		**2.882.456.000**		**2.882.456.000**		**2.882.456.000**	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah aktivitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**9.547.800**		**9.547.800**		**9.547.800**		**9.547.800**		**9.547.800**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000	2 Dokumen	1.500.000	2 Dokumen	1.500.000	2 Dokumen	1.500.000	2 Dokumen	1.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.110.000	1 Dokumen	2.110.000	1 Dokumen	2.110.000	1 Dokumen	2.110.000	1 Dokumen	2.110.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	
Koordinasi dan Penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	1.937.800	1 Dokumen	1.937.800	1 Dokumen	1.937.800	1 Dokumen	1.937.800	1 Dokumen	1.937.800	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Aktivitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2.342.313.000**		**2.342.313.000**		**2.342.313.000**		**2.342.313.000**		**2.342.313.000**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang	23 Orang	2.340.674.000	23 Orang	2.340.674.000	23 Orang	2.340.674.000	23 Orang	2.340.674.000	23 Orang	2.340.674.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1.639.000	2 Laporan	1.639.000	2 Laporan	1.639.000	2 Laporan	1.639.000	2 Laporan	1.639.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	Laporan	2.000.000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket		0 Paket		0 Paket		0 Paket		0 Paket		
Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	0 Orang	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Peraturan PerundangUndangan												
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Aktivitas Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**171.994.200**		**171.994.200**		**171.994.200**		**171.994.200**		**171.994.200**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6 Paket	6 Paket	8.500.000	6 Paket	8.500.000	6 Paket	8.500.000	6 Paket	8.500.000	6 Paket	8.500.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	0	2 Paket	0	2 Paket	0	2 Paket	0	2 Paket	0	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2 Paket	2 Paket	0	2 Paket	0	2 Paket	0	2 Paket	0	2 Paket	0	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	106.855.200	12 Paket	106.855.200	12 Paket	106.855.200	12 Paket	106.855.200	12 Paket	106.855.200	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 Paket	5 Paket	17.139.000	5 Paket	17.139.000	5 Paket	17.139.000	5 Paket	17.139.000	5 Paket	17.139.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2.640.000	2 Dokumen	2.640.000	2 Dokumen	2.640.000	2 Dokumen	2.640.000	2 Dokumen	2.640.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	396 Laporan	396 Laporan	36.860.000	396 Laporan	36.860.000	396 Laporan	36.860.000	396 Laporan	36.860.000	396 Laporan	36.860.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Aktovitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**25.560.000**		**25.560.000**		**25.560.000**		**25.560.000**		**25.560.000**	
Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Unit	1 Unit	14.000.000	1 Unit	14.000.000	1 Unit	14.000.000	1 Unit	14.000.000	1 Unit	14.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 Unit	1 Unit	11.560.000	1 Unit	11.560.000	1 Unit	11.560.000	1 Unit	11.560.000	1 Unit	11.560.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Aktivitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**202.190.000**		**202.190.000**		**202.190.000**		**202.190.000**		**202.190.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	16.500.000	12 Laporan	16.500.000	12 Laporan	16.500.000	12 Laporan	16.500.000	12 Laporan	16.500.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	25.508.000	12 Laporan	25.508.000	12 Laporan	25.508.000	12 Laporan	25.508.000	12 Laporan	25.508.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	160.182.000	12 Laporan	160.182.000	12 Laporan	160.182.000	12 Laporan	160.182.000	12 Laporan	160.182.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Aktivitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**130.851.000**		**130.851.000**		**130.851.000**		**130.851.000**		**130.851.000**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	80.826.000	14 Unit	80.826.000	14 Unit	80.826.000	14 Unit	80.826.000	14 Unit	80.826.000	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	4.000.000	4 Unit	4.000.000	4 Unit	4.000.000	4 Unit	4.000.000	4 Unit	4.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	18 Unit	10.620.000	18 Unit	10.620.000	18 Unit	10.620.000	18 Unit	10.620.000	18 Unit	10.620.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	35.405.000	2 Unit	35.405.000	2 Unit	35.405.000	2 Unit	35.405.000	2 Unit	35.405.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**15.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Aktivitas Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**			**2.500.000**		**2.500.000**		**2.500.000**		**2.500.000**		**2.500.000**	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	6 Dokumen	2.500.000	6 Dokumen	2.500.000	6 Dokumen	2.500.000	6 Dokumen	2.500.000	6 Dokumen	2.500.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit	**Jumlah Aktivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja**			**8.000.000**		**8.000.000**		**8.000.000**		**8.000.000**		**8.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**												
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	2.500.000	4 Dokumen	2.500.000	4 Dokumen	2.500.000	4 Dokumen	2.500.000	4 Dokumen	2.500.000	
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	3.500.000	4 Laporan	3.500.000	4 Laporan	3.500.000	4 Laporan	3.500.000	4 Laporan	3.500.000	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah Aktivitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			**4.500.000**		**4.500.000**		**4.500.000**		**4.500.000**		**4.500.000**	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilkasanakan	4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000	4 Dokumen	2.000.000	4 Dokumen	2.000.000	4 Dokumen	2.000.000	4 Dokumen	2.000.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	2.500.000	12 Laporan	2.500.000	12 Laporan	2.500.000	12 Laporan	2.500.000	12 Laporan	2.500.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Aktivitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	3.500.000	10 Lembaga Kemasyarakatan	3.500.000	10 Lembaga Kemasyarakatan	3.500.000	10 Lembaga Kemasyarakatan	3.500.000	10 Lembaga Kemasyarakatan	3.500.000	
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah KerjaKecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah KerjaKecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	31.500.000	1 Dokumen	31.500.000	1 Dokumen	31.500.000	1 Dokumen	31.500.000	1 Dokumen	31.500.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum													
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0 Laporan	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				**57.218.000**		**57.218.000**		**57.218.000**		**57.218.000**		**57.218.000**	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan UmumSesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah aktivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**			57.218.000		57.218.000		57.218.000		57.218.000		57.218.000	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka MemantapkanPengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti PembinaanWawasanKebangsaan dan Ketahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Orang	150 Orang	48.218.000	150 Orang	48.218.000	150 Orang	48.218.000	150 Orang	48.218.000	150 Orang	48.218.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang ditangani Sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0 Laporan	0 Laporan	**0**	0 Laporan	**0**	0 Laporan	**0**	0 Laporan	**0**	0 Laporan	**0**	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen	9.000.000	3 Dokumen	9.000.000	3 Dokumen	9.000.000	3 Dokumen	9.000.000	3 Dokumen	9.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				**36.000.000**		**36.000.000**		**36.000.000**		**36.000.000**		**36.000.000**	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Aktivitas Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**36.000.000**		**36.000.000**		**36.000.000**		**36.000.000**		**36.000.000**	
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan dalam rangka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16 Dokumen	16 Dokumen	9.000.000	16 Dokumen	9.000.000	16 Dokumen	9.000.000	16 Dokumen	9.000.000	16 Dokumen	9.000.000	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 Dokumen	16 Dokumen	6.000.000	16 Dokumen	6.000.000	16 Dokumen	6.000.000	16 Dokumen	6.000.000	16 Dokumen	6.000.000	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 Dokumen	16 Dokumen	8.500.000	16 Dokumen	8.500.000	16 Dokumen	8.500.000	16 Dokumen	8.500.000	16 Dokumen	8.500.000	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	
Faslitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pelaksanan pemilihan kepala desa	13 Dokumen	13 Dokumen	0	13 Dokumen	0	13 Dokumen	0	13 Dokumen	0	13 Dokumen	0	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	16 Dokumen	16 Dokumen	2.000.000	16 Dokumen	2.000.000	16 Dokumen	2.000.000	16 Dokumen	2.000.000	16 Dokumen	2.000.000	
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	16 Dokumen	16 Dokumen	5.000.000	16 Dokumen	5.000.000	16 Dokumen	5.000.000	16 Dokumen	5.000.000	16 Dokumen	5.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangun Partisipatif	16 Dokumen	16 Dokumen	3.500.000	16 Dokumen	3.500.000	16 Dokumen	3.500.000	16 Dokumen	3.500.000	16 Dokumen	3.500.000	
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	16 Dokumen	16 Dokumen	2.000.000	16 Dokumen	2.000.000	16 Dokumen	2.000.000	16 Dokumen	2.000.000	16 Dokumen	2.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kecamatan Bodeh sudah menerapkan penganggaran berbasis pengarusutamaan gender, pada kegiatan Musrenbang Kecamatan, dimana perwakilan kelompok perempuan menjadi salah satu komponen peserta. Pengarusutamaan gender diterapkan juga dalam fasilitasi lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yaitu fasilitasi kepada PKK dan Posyandu.

Selain menentukan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan, langkah selanjutnya yaitu menentukan target pencapaian indikator kinerja terkait SDGs, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang secara berturut – turut disajikan pada tabel di bawah ini. Namun karena Kecamatan Bodeh tidak memiliki keempat indikator tersebut, maka disampaikan Nihil sesuai tabel di bawah.

Tabel 6.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Berdasarkan SDGs

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2	**NIHIL**							
3								
dst								

Tabel 6.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2	**NIHIL**							
3								
dst								

Tabel 6.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2	**NIHIL**							
3								
dst								

Tabel 6.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2	**NIHIL**							
3								
dst								

Dalam rangka pengembangan SDM untuk mendukung kelancaran pelayanan kinerja, Kecamatan Bodeh telah menyusun Rencana Aksi Daerah Sumber Daya Manusia (RAD SDM) sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 6.6
RAD SDM Kecamatan Bodeh Tahun 2021-2026

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026		
				Target	Anggaran	Peserta	Target	Anggaran	Peserta	Target	Anggaran	Peserta	Target	Anggaran	Peserta	Target	Anggaran	Peserta	Target	Anggaran	Peserta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		21	22
1	Sosialiasai Peraturan Perundang Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang		0		50	7.500.000		50	7.500.000		50	7.500.000		50	7.500.000		50	**7.500.000**	
2	Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	Jumlah pesrta pembinaan uraian tugas kepala desa dan perangkat desa	Orang/ kegiatan	38/6	8.500.000		38/6	10.500.000		38/6	10.500.000		38/6	10.500.000		38	10.500.000		38	**10.500.000**	
3	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD	Jumlah peseta pembinaan uraitan tugas dan fungsi BPD	Orang/ kegiatan		6.000.000			8.000.000			8.000.000			8.000.000					[2]		
4	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah linmas yang mengikuti pelatihan	orang	38	35.505.000		96	17.500.000		96	17.500.000		96	17.500.000		96	17.500.000		100	17.500.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026		
				Target	Anggaran	Peserta	Target	Anggaran	Peserta	Target	Anggaran	Peserta	Target	Anggaran	Peserta	Target	Anggaran	Peserta	Target	Anggaran	Peserta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		21	22
5	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pe,mberdayaan masyarakat desa	Jumlah yang mengikuti kegiatan pemberdayaan desa	orang	50/3	8.500.000		50/3	9.500.000		50/3	9.500.000		50	9.500.000		50		18	18/14	3.370.900	18

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Renstra Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif. Renstra dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bodeh untuk kurun waktu lima tahun. Pencapaian target indikator kinerja Renstra Kecamatan Bodeh merupakan serangkaian pencapaian indikator kinerja utama perangkat daerah serta program prioritas yang termuat dalam Renstra ini. Dalam pelaksanaannya mempertimbangkan seluruh potensi dan kapasitas yang tersedia baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat yang secara sinergis bersama untuk mencapai tujuan perangkat daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Kaidah pelaksanaan yang perlu diatur dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2025 2029 adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat, Seksi dan jabatan fungsional pada Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang agar mendukung pencapaian target-target Renstra Tahun 2025-2029 dan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum Renstra Kecamatan Bodeh dengan sebaik-baiknya.
2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

https://jdih.pemalangkab.go.id

4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan ditingkat nasional, tingkat provinsi Jawa tengah dan atau perubahan kebijakan kabupaten Pemalang, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Masa berlaku Renstra Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sesuai dengan masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Pada saat Renstra Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2030-2034 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan, maka Renstra Tahun 2025-2029 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang 2030.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029, Disadari bahwa dalam penyusunan rencana strategis ini jauh dari sempurna dan masih memiliki keterbatasan-keterbatasan, sebagaimana dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Bodeh ini.

Bodeh, Juli 2025

CAMAT BODEH

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN BODEH

MISBAHUDIN, S.IP

NIP. 19690309 199203 1 001

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasar pasal 221 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan Ulujami dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Kecamatan membantu dalam pelayanan dokumen kependudukan, dan fasilitasi aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan. Melalui forum tersebut, masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya. Aspirasi yang disampaikan dan disepakati bersama selanjutnya diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Agar tujuan tersebut dapat tercapai harus didukung oleh perencanaan yang baik sehingga perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran

https://jdih.pemalangkab.go.id

setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Kecamatan Ulujami sebagai salah satu Perangkat Daerah harus menyusun Renstra. Penyusunan Renstra Kecamatan Ulujami sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kecamatan Ulujami disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra PD Kabupaten Pemalang yang terkait.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Ulujami untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Ulujami serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Renstra menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Ulujami selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana kegiatan yang

https://jdih.pemalangkab.go.id

dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan pelayanan publik yang baik dan mewujudkan masyarakat desa/kelurahan yang aktif.

Penyusunan Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Kecamatan Ulujami dimana kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Ulujami harus mendukung kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai.

Proses penyusunan Renstra meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1) Persiapan Penyusunan Renstra PD, terdiri dari pembentukan tim penyusun Renstra PD, orientasi mengenai Renstra PD, agenda kerja tim penyusun Renstra PD, penyiapan data dan informasi; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD; (3) Penyusunan Rancangan Renstra PD; (4) Forum Perangkat Daerah; (5) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD; dan (6) Penetapan Renstra PD.

Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 disajikan dalam bagan berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Gambar 1.1
Bagan Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029

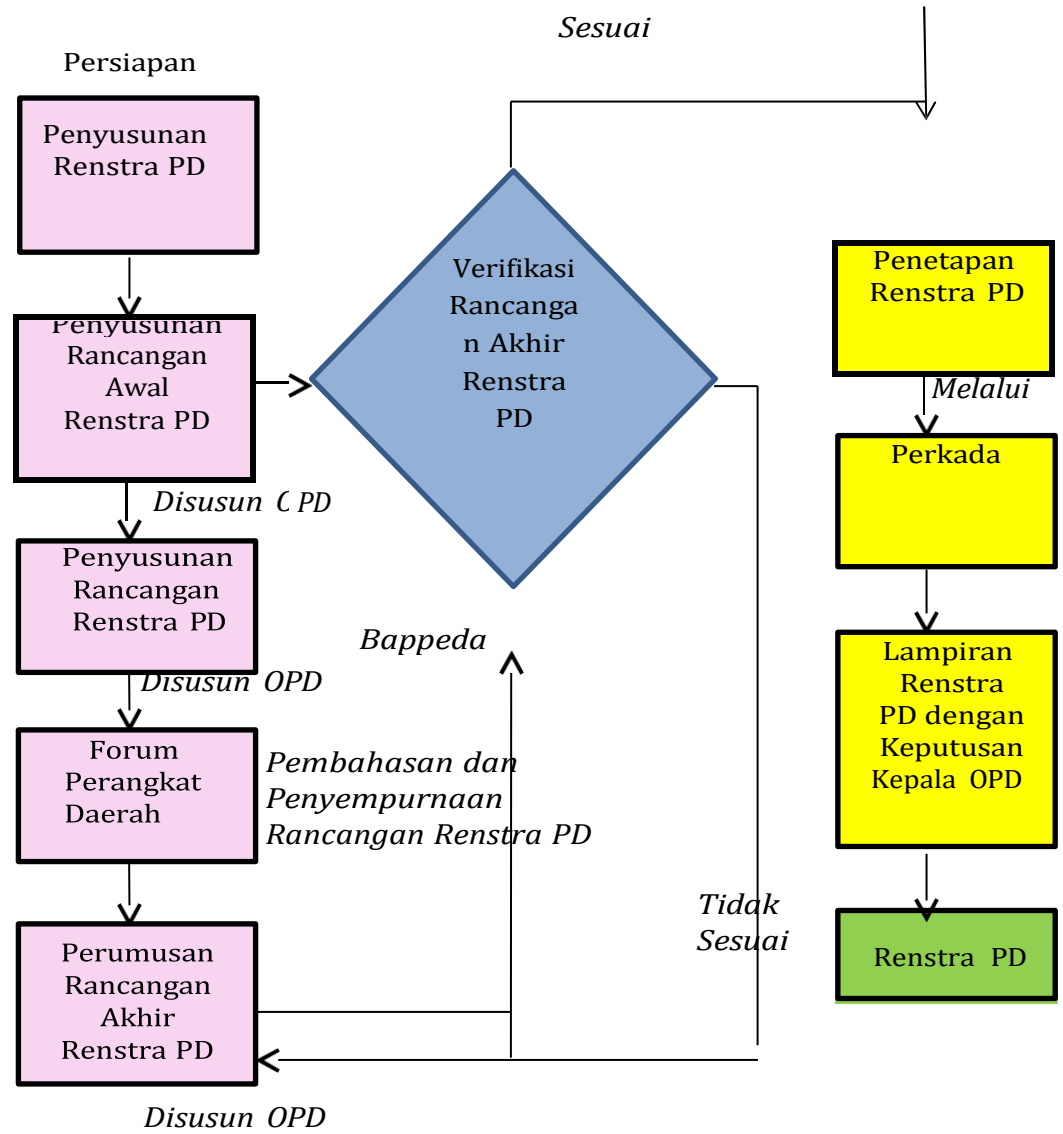

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah)

https://jdih.pemalangkab.go.id

Gambar 1.2
Konsep Penyusunan Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029

Dokumen Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang. Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS).

https://jdih.pemalangkab.go.id

Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut :

Gambar 1.3
Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

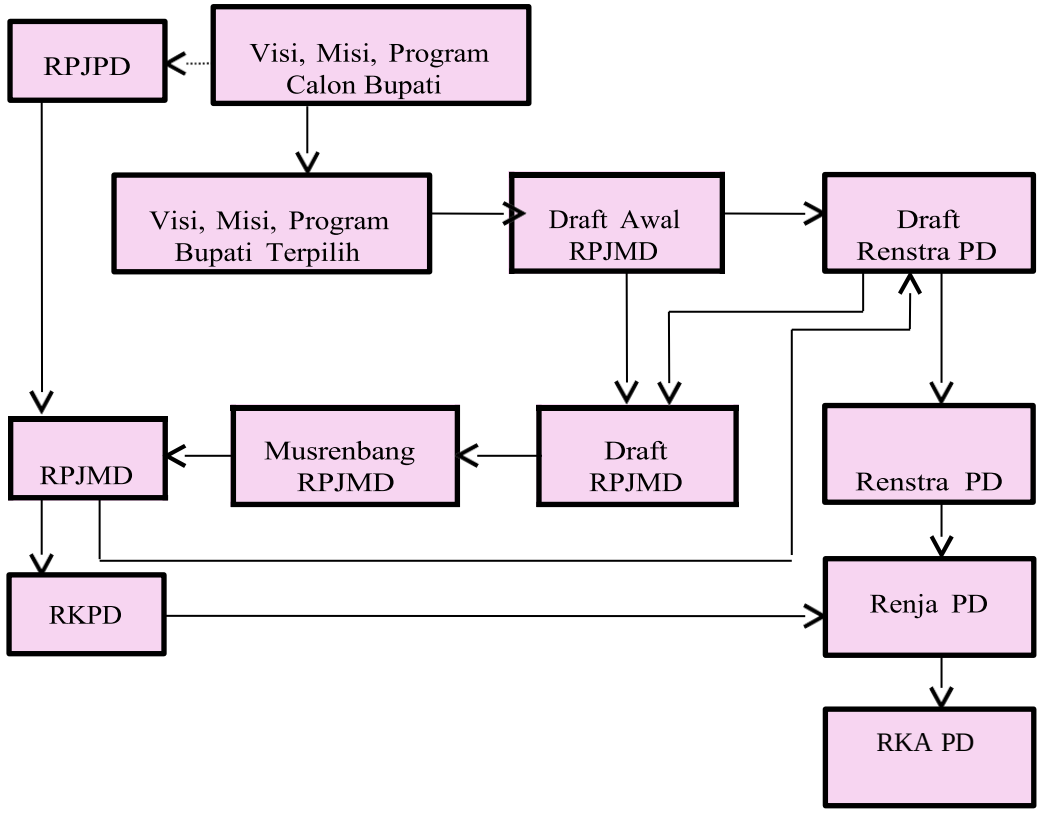

https://jdih.pemalangkab.go.id

Gambar 1.4

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

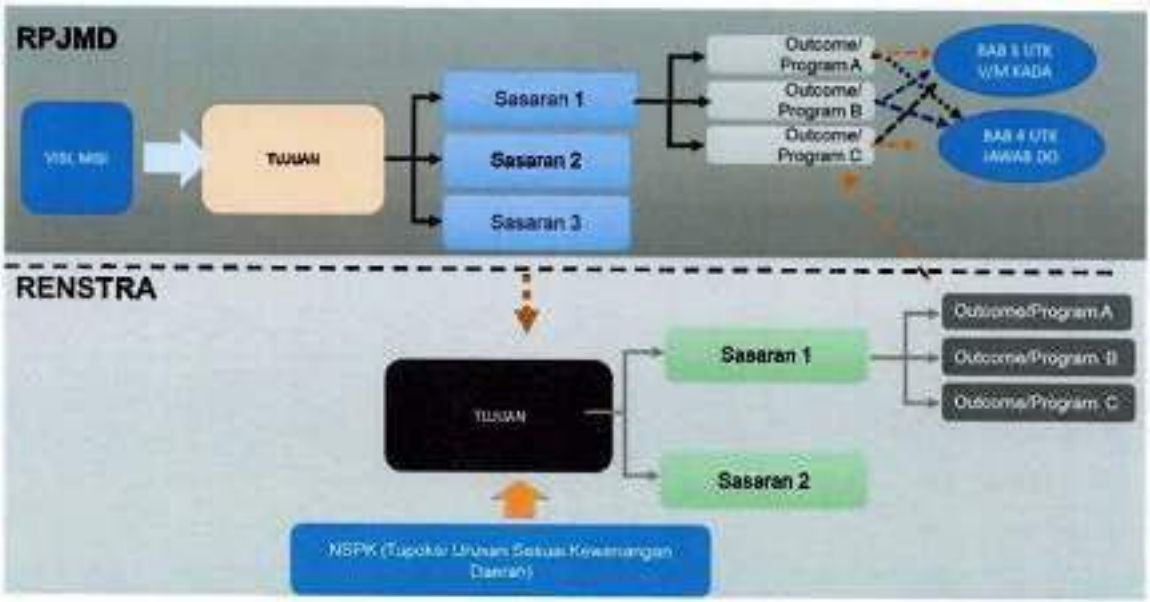

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah

https://jdih.pemalangkab.go.id

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

https://jdih.pemalangkab.go.id

12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ...);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kabupaten Pemalang Nomor 129);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2050 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang; (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor .. Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor ...);
21. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;

https://jdih.pemalangkab.go.id

22. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.
23. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 adalah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah melalui peningkatan pelayanan kecamatan yang prima.

1.3.1. Maksud

Adapun Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ulujami untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah di Urusan Kewilayahan;
b. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

a. Sebagai acuan atau Pedoman kerja bagi Kecamatan Ulujami sesuai dengan tugas dan fungsinya termasuk dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Ulujami;
b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ulujami seiap tahunnya;
c. Sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, Dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
2. Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu-isu Strategis Kecamatan Ulujami;
3. Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan berisi tujuan, sasaran jangka menengah Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029, Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 serta arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029;
4. Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, berisi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kinerja, indikator kinerja, target dan Pagu indikatif Kecamatan Ulujami yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang dalam rangka mendukung Pembangunan Daerah, Target keberhailan pencapaian tujuan dan sasaran Rentra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Target kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

5. Bab V Penutup, berisi kesimpulan kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN ULUJAMI

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Ulujami

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Ulujami.

Kecamatan Ulujami dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Ulujami mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Ulujami

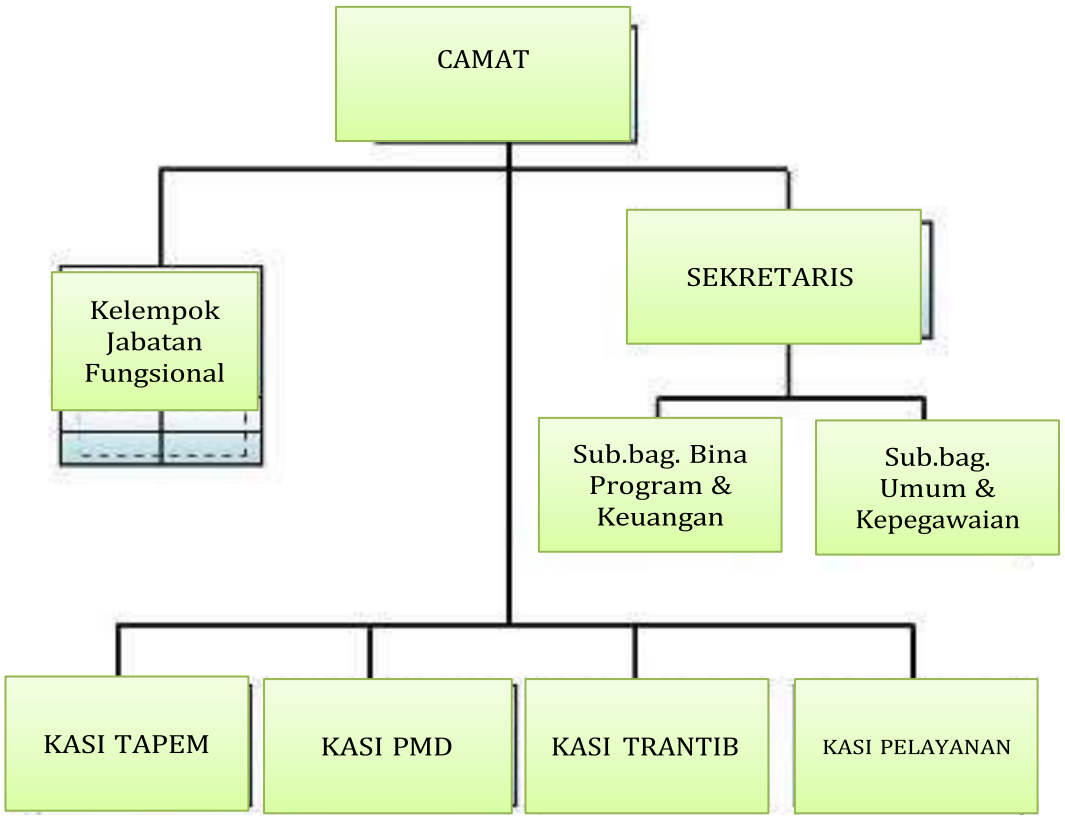

Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan Ulujami, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

A. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, Camat mempunyai uraian tugas :

1. Mengarahkan penyusunan dokumen perencanaan Kecamatan Ulujami yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan organisasi, perencanaan partisipatif dan perencanaan yang lebih tinggi dan ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Merumuskan kebijakan Kecamatan Ulujami sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Merumuskan inovasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kecamatan Ulujami melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;

https://jdih.pemalangkab.go.id

4. Mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan Kecamatan Ulujami, meliputi kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan umum dan kesekretariatan sesuai dengan tugas fungsi dan pedoman pelaksanaan agar tepat sasaran dan tujuan;
5. Mengarahkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan dengan melalui bimbingan, supervisi, fasilitasi dan evaluasi guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan;
6. Mengarahkan penyediaan dan pelayaan informasi publik serta penyusunan data dan informasi pembangunan tingkat Kecamatan Ulujami sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
7. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsinya guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh PD kabupaten yang ada di Kecamatan Ulujami sesuai dengan petunjuk pimpinan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
9. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan Peraturan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
10. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat Kecamatan Ulujami sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Merumuskan laporan penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kecamatan Ulujami berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kerja organisasi.

B. Sekretaris Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan kesekretariatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan Kecamatan Ulujami dan seluruh seksi dan subbagian sesuai dengan kebituhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
5. Mengoordinasikan penyusunan kondep inovasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan Ulujami dan seluruh seksi dan subbagian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) tingkat Kecamatan Ulujami sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

9. Melaksanakan tugas dan kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

a. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Menyusun konsep dokumen perencanaan Kecamatan Ulujami yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan oprganisasi, perencanaan partisipatif, dan perencanaanyang lebih tinggi guna dirumuskan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep laporan capaian kinerja Kecamatan Ulujami yang meliputi LKJiP, laporan pelaksanaan APBD dan laporan kinerja lain berdasarkan Renja dan realisasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban;
5. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib adminstrasi;
6. Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan keuangan;
7. Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi LRA, LO, LPE, neraca dan CaLK serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;
8. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;

https://jdih.pemalangkab.go.id

9. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
10. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kecamata sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepasa pimpinan;dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai sengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengelola kegiatan administrasi surat menyurat, kepegawaian, penataan arsip, dokumentas, dan kearsipan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
4. Mengelola kegiatan kerumahtanggaan meliputi penyediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, pelayanan tamu dinas dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas sesuai dengan pedoman

https://jdih.pemalangkab.go.id

pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

5. Mengelola administrasi barang milik daerah yang meliputi penyusunan analisa kebutuhan dan pemeliharaan barang, penatausahaan barang, dan penyusunan administrasi barang lainnya sesuai dengan peraturan pengelolaan barang milik daerah guna tertib administrasi;
6. Mengelola kegiatan ketatalaksanaan meliputi penyusunan standart dan prosedur kerja sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Mengelola kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi penyediaan dan pelayanan informasi publik, penyusunan data informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian, pengaturan tata tempat dan tata acara serta kegiatan kehumasan dan keprotokolan lain sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

C. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai uraian tugas:

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai

https://jdih.pemalangkab.go.id

bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;

2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta, dan pihak terkait lain di tingkat Kecamatan Ulujami guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan memeriksa berkas yang diajukan kepala desa sebagai bahan konsultasi kepada pimpinan guna disahkan oleh pimpinan;
5. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan melalui fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, fasilitasi pemberian tunjangan perangkat desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;
6. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Seksi Tata Pemerintahan meliputi data monografi desa, data perangkat desa dan data terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
8. Menyusun konsep motivasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;

https://jdih.pemalangkab.go.id

9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

D. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, keagamaan, pembinaan kesehatan, keluarga berencana, organisasi perempuan, pendidikan, pemuda dan olahraga dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta dan pihak terkait lain di tingkat Kecamatan Ulujami guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan sosial desa melalui fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pembangunan desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjaama desa dengan pihak ketiga, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, koordinasi pendampingan desa, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa bidang pemberdayaan

https://jdih.pemalangkab.go.id

masyarakat dan kesejahteraan sosial guna tertib administrasi dan kelancaran dan penyelenggaraan pemerintahan desa;

5. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan Ulujami dengan melibatkan stakeholder terkait demi tercapainya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran;
6. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan tingkat Kecamatan Ulujami sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan dan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawabkan kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

E. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

https://jdih.pemalangkab.go.id

3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Ulujami meliputi fasilitasi pengaduan masyarakat, kejadian musibag, bencana umum atau kejadian luar biasa lainnya serta upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lainnya dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan pemuka agama/tokoh masyarakat serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau desa/kelurahan serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna tegaknya peraturan;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah yang ada di wilayah Kecamatan Ulujami dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dan/atau swasta dan/atau pihak terkait lainnya sesuai dengan prosesur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keamanan dan terpeliharanya prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah;
6. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan yang bergerak di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
7. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;

https://jdih.pemalangkab.go.id

8. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kebutuhan informasi publik;
9. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

F. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan kegiatan koordinasi terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Ulujami dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat Kecamatan Ulujami dan kabupaten, pemerintah desa/kelurahan, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep rencana operasional dan standar pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
5. Melaksanakan kegiatan fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan Ulujami di bidang perizinan, non perizinan, administrasi pertanahan dan pelayanan administrasi lainnya sesuai kewenangannya mulai

https://jdih.pemalangkab.go.id

dari penerimaan dan pemeriksaan dokumen/berkas permohonan, cek lokasi apabila disyaratkan, pengesahan hingga penyampaian kembali dokumen/berkas kepada pemohon guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;

6. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Ulujami sesuai dengan prosedur dan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
7. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Ulujami sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tercapainya kepuasan masyarakat;
8. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang- undangan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
9. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Ulujami melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
10. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Ulujami sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Ulujami

Sumber daya Kecamatan Ulujami sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

a. Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Jumlah pegawai di Kecamatan Ulujami dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyakatan sosial tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.
Pegawai Kecamatan Ulujami

No	Uraian	Laki-Laki	Perempua	Golongan				Jumla
				I	II	III	IV	
1	Camat	1	0	0	0	0	1	1
2	Sekcam	0	0	0	0	0	0	0
3	Kasubag	1	0	0	0	1	0	1
4	Kasi Kecamatan Ulujami	2	0	0	0	2	0	2
5	JFU Kecamatan Ulujami	6	5	1	7	3	0	11
6	JFT Kecamatan Ulujami	0	0	0	0	0	0	0
7	Non ASN Kecamatan Ulujami	4	3	0	0	0	0	0
Jumlah		14	8	1	7	6	1	15

Sumber : Sekretariat Kecamatan Ulujami 2025

Pegawai Kecamatan Ulujami berjumlah 22 orang, meliputi 14 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Ulujami dominan laki-laki yaitu sebanyak 63,64 %. Agar Kecamatan Ulujami menerapkan responsif gender untuk perekrutan tenaga non ASN selanjutnya disarankan berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya jumlah pegawai berdasar golongan, meliputi non ASN sebanyak 7 orang, golongan I sabanyak 1 orang, golongan II sebanyak 7 orang, golongan III sebanyak 6 orang dan Golongan IV sebanyak 1 orang. Dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Ulujami didominan oleh ASN sebanyak 68,18% dan dominan golongan III yaitu sebanyak 40,00 %.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.2.
Data Pegawai Berdasar Diklat Kepemimpinan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Diklatpim III	1	1	0
2	Diklatpim IV	2	2	0
3	ADUM	0	0	0
4	SEPADA	0	0	0
5	Struktural yang belum diklat	2	2	0
Jumlah		5	5	0

Sumber : Sekretariat Kecamatan Ulujami 2025

Jumlah pegawai berdasarkan diklat kepemimpinan pada Kecamatan Ulujami, yaitu 1 orang sudah mengikuti Diklatpim III, 2 orang sudah mengikuti Diklatpim IV, 0 orang sudah mengikuti ADUM dan 2 orang belum mengikuti diklat kepemimpinan, hal ini disebabkan masih menunggu penyelenggaraan diklat dari instansi yang berwenang.

Tabel 2.3.
Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pasca Sarjana (S2)	0	0	0
2	Sarjana (S1)	11	9	2
3	Diploma	0	0	0
4	SLTA	3	1	2
5	SLTP	0	0	0
6	SD	1	1	0
Jumlah		15	11	4

Sumber : Sekretariat Kecamatan Ulujami 2025

Jumlah pegawai Kecamatan Ulujami berdasar tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S2) sebanyak 0 orang, Sarjana (S1) sebanyak 11 orang, Diploma sebanyak 0 orang, SLTA sebanyak 3 orang dan SD sebanyak 1 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara kualitas SDM di Kecamatan Ulujami masih perlu

https://jdih.pemalangkab.go.id

ditingkatkan karena pegawai di Kecamatan Pemalang dominan berpendidikan Sarjana yaitu sebanyak 73,33%.

Tabel 2.4.
Data Pegawai Berdasar Tingkat Eselon

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	IIIA	1	1	0
2	IIIB	0	0	0
3	IVA	3	3	0
4	IVB	1	1	0
Jumlah		5	4	0

Sumber : Sekretariat Kecamatan Ulujami, 2025

Jumlah pegawai Kecamatan Ulujami berdasarkan tingkat eselon, yaitu Eselon IIIA sebanyak 1 orang, Eselon IIIB sebanyak 0 orang, Eselon IVA sebanyak 3 orang, Eselon IVB sebanyak 1 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Kecamatan Ulujami berdasarkan tingkat eselon dominan esselon IVA yaitu sebanyak 60 %.

b. Sarana dan Prasarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Kecamatan Ulujami dapat dilihat pada tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.5.
Inventaris Aset Kecamatan Ulujami

No	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Jumlah Harga (Rp)
					Baik	Sedang	Rusak	
1	01		Tanah					
		01	Tanah	1 (3.470)				694.000.000
			Jumlah KIB A					
2	01		Peralatan dan Mesin					
		02	Alat-alat Besar	0				-
		03	Alat-alat Angkutan	14	9	5	0	240.000.000
		04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	0				
		05	Alat Pertanian					
		06	Alat Kantor & Rumah Tangga	450	150	170	130	800.000.000
		07	Alat Studio & Alat Komunikasi	4	1	1	2	10.000.000
		08	Alat-alat Kedokteran					
		09	Alat Laboratorium					
		10	Alat-alat persenjataan/keamanan					
			Jumlah KIB B					
3	03		Gedung dan Bangunan	4	4	-	-	1.710.126.000
		11	Bangunan Gedung					
		12	Monumen					
			Jumlah KIB C					
4	04		Jalan, Irigasi dan Jaringan					
		13	Jalan & Jembatan					
		14	Bangunan Air/Irigasi					
		15	Instalasi	1	1			5.000.000
		16	Jaringan	1	1			2.000.000
			Jumlah KIB D					
No	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Jumlah Harga (Rp)
					Baik	Sedang	Rusak	
5	05		Aset Tetap Lainnya					
		17	Buku dan Perpustakaan	45	45			180.000
		18	Barang Bercorak Kebudayaan					
		19	Hewan, Ternak dan Tanaman					
			Jumlah KIB E					
6	06		Konstruksi dalam Pengerjaan					
			Jumlah KIB F					
			Jumlah Total	519	211	176	132	3.416.286.000

Sumber : Sekretariat Kecamatan Ulujami 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

Berdasar tabel 2.6, sarana dan prasarana perkantoran yang dimiliki oleh Kecamatan Ulujami sudah cukup dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

c. Administrasi Kewilayahan
Terdapat 18 desa di Kecamatan Ulujami dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.6.
Administrasi Kewilayahan Kecamatan Ulujami

No	Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT	Jumlah Perangkat Desa	Jumlah Linmas	Ket
1	Desa Sukorejo	5	10	35	12	32	
2	Desa Botekan	3	6	25	10	25	
3	Desa Rowosari	5	5	29	12	43	
4	Desa Ambowetan	3	3	20	10	24	
5	Desa Pagergunung	6	6	29	13	40	
6	Desa Wiyorowetan	3	5	18	10	36	
7	Desa Samong	3	6	28	10	28	
8	Desa Tasikrejo	3	6	27	10	40	
9	Desa Bumirejo	3	3	19	10	25	
10	Desa Kaliprau	4	6	35	11	76	
11	Desa Kertosari	4	2	18	11	25	
12	Desa Pamutih	4	7	26	11	40	
13	Desa Padek	3	6	20	10	21	
14	Desa Blendung	5	9	37	12	48	
15	Desa Ketapang	2	3	18	9	39	
16	Desa Limbangan	6	8	36	13	48	
17	Desa Mojo	4	8	50	11	96	
18	Desa Pesantren	7	7	37	14	48	
Jumlah		73	106	507	199	734	

Sumber : Sekretariat Kecamatan Ulujami 2025

Kecamatan Ulujami terdiri dari 18 desa, 507 RT dan 106 RW. Untuk menjaga ketentraman dan ketertiban wilayah, Kecamatan didukung oleh 734 personil Linmas.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Ulujami

Gambaran kinerja pelayanan Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 diperoleh dari dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.7 dan Tabel 2.8 berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.7.a
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang
Berdasarkan Renstra tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai LKJIP				35,34	33,86	35,40	35,40	45,47	35,34	33,86	48,10	54,85	60,04	100	100	86,18	96,85	132,04
2	Prosentase penyerapan anggaran				95	95	86,32	86,32	93,35	cc	99.87	87,81	93,33	87,81	103,47	104,31	86,32	1,08	94,06
3	Rata-rata persentase partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam musrenbang desa				100	100	80	100	100	83	83	84	76	80	100	100		100	100
4	Prosentase kelengkapan administrasi desa Binaan				75	75	71,88	66,67	72,22	57,89	80	66,67	63,00	72,22	77,19	106,67	106,67	100	112
5	Nilai SKM				Na	Na	Na	83,95	85,36	83,95	85,36	86,18	88,16	88,8	na	na	na	100	100
6	Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan public				90	90	90	90	90	96	95,56	96	96	87	100	100	101	111	92

Sumber : Kecamatan Ulujami, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

Berdasarkan tabel 2.7.a dapat diketahui pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Ulujami selama tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Melebihi target, meliputi :
   - Prosentase penyerapan anggaran (2020 – 2024)
   - Rata-rata persentase partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam musrenbang desa (2020 – 2024)
   - Prosentase kelengkapan administrasi desa binaan (2020 – 2024)
   - Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan publik (2020 – 2024) Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :
     a. Komitmen dari semua pihak;
     b. Sarana dan prasarana yang memadai;
     c. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM;
     d. Komunikasi dan koordinasi yang intens antar instansi.

2. Memenuhi target, meliputi :
   - Nilai LKJIP (2020 – 2024)
   - Prosentase kelengkapan administrasi desa binaan (2024)
   - Nilai SKM (2020 – 2024)
   - Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan publik (2020 – 2024) Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :
     a. Komitmen dari semua pihak;
     b. Sarana dan prasarana yang memadai;
     c. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM;
     d. Komunikasi dan koordinasi yang intens antar instansi

3. Tidak memenuhi target, meliputi :
   - Prosentase penyerapan anggaran (2024) yang disebabkan oleh kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan
   - Prosentase kelengkapan administrasi desa binaan (2024) yang disebabkan oleh : (1) Masih ada beberapa desa yang kurang memahami tentang pembuatan kelengkapan administrasi desa; (2) Masih kurangnya SDM yang memadai; dan (3) Pembinaan yang kurang terjadwal.
   - Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan publik (2024) yang disebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pelayanan publik

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.7. b
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Sesuai Bab II RPJMD tahun 2025- 2029

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	%	100	100	100	100	100
2	Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	%	86,67	66,67	66,67	100	100
3	Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan	%	82,5	92,5	92,5	100	100
4	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi	%	50	50	50	100	86
5	Persentase jalan kewenangan kelurahan kondisi baik	%	NA	NA	NA	NA	NA
6	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	%	100	100	100	100	100
7	Jumlah potensi konflik	kasus	0	2	2	0	2
8	Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik	%	61,11	61,11	66,67	66,67	72,22

Sumber : Kecamatan Ulujami,, 2025

Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung meningkat, yaitu sebesar 40% pada tahun 2020 menjadi sebesar 73% pada tahun 2024. Hal tersebut disebabkan adanya kesiapan sumber daya manusia, tersedianya anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas serta kurangnya dukungan dari PD terkait.

Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan selama kurun waktu tahun 2020 – 2024 mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini karena semakin banyak masyarakat yang sadar untuk menyuarakan pendapatnya dalam forum musyawarah tingkat kecamatan demi kemajuan wilayah desa masing – masing. Persentase Lembaga Kemasyarakatan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Desa/Kelurahan yang dibina selama kurun waktu tahun 2020-2024 stagnan, yaitu sebesar 100%. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina yaitu RW, PKK, karang taruna, Posyandu, LPMD/K dan RT.

Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi selama kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung stagnan, yaitu sebesar 100%. LKD merupakan mitra kecamatan dalam pembangunan kecamatan sehingga perlu untuk difasilitasi kegiatannya.

Persentase jalan kewenangan desa kondisi baik dalam kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung meningkat, yaitu sebesar 10% pada tahun 2020 menjadi sebesar 25% pada tahun 2024. Meskipun cenderung meningkat dari tahun ke tahun, capaian tersebut masih jauh dari target yang diharapkan. Kondisi tersebut disebabkan terbatasnya anggaran yang dialokasikan dan masih kurangnya dukungan dari PD terkait.

Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani selama kurun waktu tahun 2020-2024 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada gangguan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan dapat ditangani dengan baik.

Pada tahun 2020 - 2024 masih terdapat potensi konflik. Potensi konflik ini terjadi antar desa akibat adanya perbedaan pendapat dan kesalahpahaman. Namun, potensi konflik yang terjadi tersebut dapat diselesaikan dengan baik lewat koordinasi di tingkat kecamatan.

Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik selama kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung stagnan, yaitu sebesar 60 %. Penilaian tata pemerintahan yang baik dilihat dari aspek ketepatan pengumpulan laporan administrasi desa, ketepatan pengumpulan data perkembangan desa , aspek pelaporan data kependudukan tiap bulan dan hal – hal administratif lain.

Tabel 2.8. c
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang
Berdasarkan SDGs

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2	NIHIL					
3						

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel
2.8. d

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang

Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2	NIHIL					
3						

Tabel
2.8. e

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang

Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2	NIHIL					
3						

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.8.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	144.541.000	160.785.000	177.300.000	287.875.000	413.215.000	139.219.508	159.985.000	168.605.010	282.411.527	408.499.884	96.32	99.50	95,10	98.10	99.86	31,85	33,11
Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	191.200.000	176.200.000	809.945.000	443.000.000	395.800.000	190.894.099	176.143.874	739.911.000	442.580.000	393.500.000	99.84	99.97	91.92	99.91	99.42	73,97	65,26
Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8.600.000	5.000.000	10.000.000	29.450.000	6.550.000	8.600.000	5.000.000	10.000.000	29.450.000	6.550.000	100	100	100	100	100	43,72	43,72
Progran peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	40.340.000	51.000.000	55.500.000	71.800.000	50.150.000	40.340.000	51.000.000	55.500.000	71.800.000	50.150.000	100	1`00	100	100	100	8,62	8,62
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	10.000.000					10.000.000					100						
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	105.800.000					105.800.000					100						
Program peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan	32.000.0000					32.000.000					100						-
Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran		279.100.000	318.550.000	374.700.000	217.160.000	279.100.000	279.100.000	318.550.000	374.700.000	217.160.000		100	100	100	100	-3,43	-2,57
Program pengembangan kewilyahan					59.727.000					59.727.000					100		
Jumlah	820.481.000	672.085.000	1.371.295.000	1.206.825.000	1.142.602.000	805.953.607	671.228.874	1.292.566.010	1.200.941.527	1.135.586.884							
Rata – Rata											86,59	99,89	97,29	99,60	99,71	30,95	29,63

Sumber : Kecamatan Ulujami, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

Berdasar tabel 2.9, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu tahun 2020-2024 rasio antara realisasi dan anggaran Kecamatan Ulujami cenderung stabil, yaitu dengan rata-rata sebesar 86,59% pada tahun 2020 menjadi sebesar 99,71% pada tahun 2024. Hal ini berarti dana yang sudah dianggarkan dapat terserap secara optimal untuk pelaksanaan pelayanan Kecamatan Ulujami. Besaran anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Ulujami selama kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 30,95%. Besaran realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2020-2024 juga cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 29,63%. Peningkatan anggaran menjadi salah satu pendorong dapat tercapainya target kinerja pelayanan sesuai dengan yang telah ditetapkan Berdasar tabel 2.9, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu tahun 2020-2024 rasio antara realisasi dan anggaran Kecamatan Ulujami cenderung stabil, yaitu dengan rata-rata sebesar 86,59% pada tahun 2016 menjadi sebesar 99,71% pada tahun 2024. Hal ini berarti dana yang sudah dianggarkan dapat terserap secara optimal untuk pelaksanaan pelayanan Kecamatan Ulujami. Besaran anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Ulujami selama kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 30,95%. Besaran realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2020-2024 juga cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 29,63%. Peningkatan anggaran menjadi salah satu pendorong dapat tercapainya target kinerja pelayanan sesuai dengan yang
telah ditetapkan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dalam dokumen Rencana strategis terdapat 2 indikator sasaran Kecamatan Ulujami tahun 2021-2026 yaitu :

Tabel 2.2.
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran serta target Kinerja Kecamatan Ulujami

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
Misi ke- 2: *"Mewujudkan "good govemance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik"*								
	Meningkatkan pelayanan kecamatan yang Prima		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	86,18	86,23	86,26	86,33	86,35
		Meningkatknya kualitas pelayanan kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	89,25	89,45	90,76	90,96	92,07

**Dalam renstra Kecamatan Ulujami terdapat satu tujuan, Satu sasaran dan 2 Indikator Sasaran*

Dalam Dokumen rencana Strategis dibandingkan Dokumen Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Ulujam tahun 2022, kesesuaian antara program dan kegiatan serta indikator sasaran kegiatan telah sesuai yaitu terdapat 6 Program dengan 54 Kegiatan dengan rincian:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
d. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

https://jdih.pemalangkab.go.id

.

Tabel 2.3

Rincian realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2023 untuk masing-masing program tersebut diantaranya :

No.	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu(Rp)	Realisasi	Persentase realisasi (%)	Pagu(Rp)	Realisasi	Persentase realisasi (%)
		2022			2023		
1	Progam Penunjang Urusan Pemerinatahan Daerah Kabupaten /Kota	3.274.373.998,-	2.946.428.642,-	90.46	3.021.829.750	2.771.280.615	91.74
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;	39.993.000,-	39.993.000,-	100	24.993.000	24.993.000	100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	27.000.000,-	27.000.000,-	100	36.000.000	36.000.000	100
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	6.000.000,-	6.000.000,-	100	6.000.000	6.000.000	100
5	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	53.658.000-	53.658.000-	100	53.658.000	53.658.000	100
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35.000.000-	35.000.000-	100	31.000.000	31.000.000	100

https://jdih.pemalangkab.go.id

1. Untuk Rincian Realisasi Kinerja Kecamatan Ulujami Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

   a) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, terdiri dari 7 (tujuh)kegiatan dengan realisasi kinerja terdiri dari :

      1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan realisasi kinerja persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun dengan realisasi kinerja 100% selama 12 bulan;
      2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi kinerja persentase laporan keuangan perangkat daerah 100% selama 12 bulan;
      3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan realisasi kinerja persentase administrasi kepegwaian perangkat daerah 100% selama 12 Bulan;Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas 100% selama 12 bulan;
      4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi kinerja persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas 100% selama 12 bulan;
      5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi kinerja persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas 100% selama 12 bulan;

https://jdih.pemalangkab.go.id

6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi kinerja Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% selama 12 bulan;

b) **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, terdiri 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi Kinerja sebagai berikut :

1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan realisasi kinerja Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100% selama 12 bulan;
2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan denga realisasi kinerja Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 100% selama 12 bulan;
3) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan realisasi kinerja Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100% selama 12 bulan.

c) **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan,** Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan,, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi Kinerja :

1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan realisasi kinerja terlaksananya Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 96% selama 12 bulan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

d) **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum,** terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi Kinerja sebagai berikut :

1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan realisasi 100% selama 12 bulan.

e) **Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan rincian realisasi Kinerja :

1) Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan realisasi kinerja Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Desa 100% selama 12 bulan.

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran serta target Kinerja Kecamatan Ulujami

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
				2022	2023	2026	2025	2026
Misi ke- 2: "Mewujudkan "good govemance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik"								
	Meningkatkan pelayanan kecamatan yang Prima		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	86,18	86,23	86,26	86,33	86,35
		Meningkatknya kualitas pelayanan kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	89,25	89,45	90,76	90,96	92,07

**Dalam renstra Kecamatan Ulujami terdapat satu tujuan, Satu sasaran dan 2 Indikator Sasaran*

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2022 dan 2023

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021- 2026, dengan sasaran Kecamatan yaitu **"Meningkatnya pelayanan pelayanan Kecamatan",** Telah dijabarkan kedalam dua indikator kinerja utama Perangkat daerah sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut :

Tabel 2.5
Indikator Capaian Kinerja Kecamatan Ulujami
Tahun 2021 dan2022 berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,18	86,18	86,23	88,16
2	Cakupan Layanan Kecamatan	%	86,32	91,76	86,32	93,33

2.1.4. Kelompok sasaran layanan

Kecamatan Ulujami kelompok sasaran yang dilayani adalah masyaarakat desa di Wilayah Kecamatan Ulujami dan Desa 18 Desa di Kecamatan Ulujami.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.1.5. Mitra dalam Pemberian Pelayanan

Kecamatan Ulujami Mitra dalam Pemberian Pelayanan dengan Ka. Polsek Ulujami dan Koramil 05/Ulujami.

2.1.6. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Kecamatan Ulujami

Tidak ada dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Kecamatan Ulujami

2.1.7. Kerjasama Daerah menjadi tanggung jawab Kecamatan Ulujami

Kerjasama Daerah menjadi tanggung jawab Kecamatan Ulujami adalah Kerjasama dengan Kabupaten Pekalongan dalam batas Wilayah Kabupaten Pemalang.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

2.2.1. Permasalah Pelayanan Kecamatan Ulujami

Kecamatan Ulujami dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Kecamatan Ulujami di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung

https://jdih.pemalangkab.go.id

pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Ulujami tahun 2025-2029, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Ulujami adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/ kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan;
6. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran;
7. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Ulujami adalah sebagai berikut :

1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

https://jdih.pemalangkab.go.id

2. Adanya Perangkata Daerah dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
3. Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Adanya Perangkat Daerah dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa;
6. Adanya pendampingan dari Perangkat Daerah terkait;
7. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Ulujami

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia	Masih terbatasnya jenis data pemerintahan	Masih terbatasnya data pemerintahan yang tersedia
		Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat	Belum tersedianya SOP pelayanan yang sesuai Kebutuhan
			Masih kurangnya peran Kecamatan dalam pencapaian SPM
			Masih terdapat kasus pengaduan masyarakat
		Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati	Masih terdapat pengajuan izin non usaha
			Masih terdapat ketidaksesuaian data masyarakat Miskin
			Masih terdapat pengajuan surat non perizinan
2	Masih rendahnya peran serta	Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Masih rendahnya tingkat partisipasi Musrenbang Desa
			Masih rendahnya tingkat partisipasi Musrenbang Kecamatan

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masal
	dan kelurahan	Desa	Belum optimalnya pendampingan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten
		Belum optimalnya peran serta lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Masih rendahnya sarana prasarana yang dimiliki lembaga kemasyarakatan tingkat
			Masih rendahnya kapasitas pengelola lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan
3	Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan	Masih rendahnya linmas yang mempunyai kompetensi	Masih terbatasnya Linmas yang mengikuti pelatihan
		Belum optimalnya koordinasi penegakkan Perda/Perbup	Belum optimalnya koordinasi monitoring penegakkan Perda/Perbup
4	Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	Masih banyak masyarakat yang belum paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Belum optimalnya peringatan hari besar nasional dan hari besar agama sebagai upaya menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
			Masih minimnya pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
			Belum optimalnya penanganan potensi konflik social
			Perlu ditingkatkannya koordinasi antar pimpinan di Kecamatan
5	Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Masih banyak desa yang belum mampu menyusun Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
			Masih banyak desa yang belum mampu melaksanakan administrasi tata pemerintahan desa
			Masih banyak desa yang belum mampu mengelola keuangan desa dan mendayagunakan aset
			Belum optimalnya pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa
			Ada desa yang mengadakan pemilihan kepala desa
			Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
			Ada desa yang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masala
			Penataan arsip belum sesuai ketentuan
		Belum tercukupinya BMD sesuai kebutuhan	Belum tercukupinya kebutuhan kendaraan dinas
			Belum tercukupinya kebutuhan mebel
			Belum tercukupinya kebutuhan peralatan dan mesin Lainnya
			Belum tercukupinya kebutuhan sarpras gedung kantor
		Belum optimalnya penyediaan jasa penunjang untuk memperlancar pelaksanaan tugas	Masih terjadi surat yang tidak terkirim atau terlambat
			Terdapat kebutuhan listrik, PDAM yang harus dibayar
			Terdapat kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang harus dibayar
			Jumlah ASN belum mencukupi kebutuhan
		Belum optimalnya pemeliharaan BMD	Terdapat kendaraan dinas yang harus dipelihara
			Terdapat mebel yang harus dipelihara
			Terdapat peralatan dan mesin yang harus dipelihara
			Terdapat gedung kantor yang harus dipelihara
			Terdapat sarpras pendukung gedung kantor yang harus dipelihara

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.2.2. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berlangsung dalam jangka menengah/ panjang. (Permendagri 86 tahun 2017). Isu strategis Kabupaten Pemalang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu strategis global, Nasional, dan Provinsi, dan memperhatikan potensi, peluang dan tantangan yang ada di Kabupaten Pemalang selama kurun waktu tahun 2025-2029. Isu Global, Nasional, dan Provinsi Jawa Tengah dan isu strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pemalang dapat diidentifikasi sebagai berikut.

2.2.2.1. Telaah Isu Strategis Lingkungan Global

1. Resiko Kegagalan *Climate Action*

Perubahan iklim yang disebabkan pemanasan global akan menyebabkan berbagai risiko terhadap ekosistem dan manusia. Dalam jangka panjang, perubahan iklim akan menimbulkan masalah kesehatan yang besar, kematian dini, risiko terhadap kota dan pemukiman, serta bahaya lainnya. Mitigasi sangat dibutuhkan dan cepat. Karena perubahan iklim berkaitan dengan isu-isu lain dalam dokumen perencanaan ini, perubahan iklim menjadi salah satu tantangan paling serius yang dihadapi umat manusia.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Akselerasi dalam perbaikan lingkungan adalah suatu hal yang wajib dilakukan secara global. Meskipun upaya pengurangan emisi global telah mulai dilakukan sejak satu dekade terakhir tetapi hasil yang diharapkan masih belum optimal.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh PBB, Masih terjadi kesenjangan emisi yang signifikan antara apa yang dibutuhkan dengan apa yang dicapai. Bila ingin mencapai target 2030 maka mulai saat ini perlu mengurangi emisi sebesar 7,6% setiap tahun selama 10 tahun ke depan untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat.

Secara global *Climate Action* harus mulai dari proses dekarbonisasi dimana salah satu sumber utama dari emisi karbon berasal dari aktivitas ekonomi. Hal ini merupakan tantangan utama dalam aksi iklim ini, mengingat selalu ada trade off antara pertumbuhan ekonomi dengan besarnya emisi karbon yang dihasilkan. Perlindungan terhadap ekosistem merupakan salah satu alternatif upaya terbaik yang bisa dilakukan oleh semua negara, serta upaya untuk lebih beradaptasi untuk masa depan terkait pola hidup rendah emisi.

Terkait dengan hal tersebut perlu adanya antisipasi dari Pemerintah Kabupaten Pemalang dan masyarakat dunia dalam menyikapi global warming. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian

https://jdih.pemalangkab.go.id

alam dapat terjaga dan efek global warming dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

2. Deglobalisasi

Ada sinyal kuat bahwa era globalisasi akan segera berakhir, berdasarkan analisis yang dilakukan oleh analis riset di Barclays Corporate and Investment Bank. Setelah hampir satu abad globalisasi, guncangan global berturut-turut dan gerakan untuk menghadapi perubahan iklim tampaknya mulai membalikkan keadaan. Saat ini, "perlambatan" tampaknya bergerak menuju deglobalisasi. Gangguan yang terjadi baru-baru ini terhadap rantai nilai global seperti pandemi COVID-19, perang di Ukraina, meningkatnya perbedaan ideologi, dan transisi ramah lingkungan dan hilangnya hak kelas menengah di negara- negara maju dan meningkatnya kekhawatiran akan ketergantungan yang berlebihan pada perdagangan dengan mitra tunggal menyebabkan periode "pelambatan" yang relatif stagnan.

Keadaan ini telah mendorong pemerintah dan perusahaan untuk mempertimbangkan kembali ketergantungan pada eksternal. Mereka mencari model pertumbuhan yang lebih tangguh dan lebih dekat dengan negara asal mereka dan mitra terpercaya.

https://jdih.pemalangkab.go.id

3. **Krisis Lapangan Pekerjaan**

Dunia sedang menghadapi krisis lapangan kerja. Angka riil global lebih dari 30% atau berjumlah 3,3 miliar orang. Angkatan kerja global mencakup orang-orang yang bekerja dan orang-orang yang sedang mencari pekerjaan; tidak termasuk anak-anak, pensiunan, pelajar, ibu rumah tangga, atau orang yang tidak sedang mencari pekerjaan.

4. **Krisis Utang**

Negara-negara termiskin di dunia sedang menghadapi krisis utang yang semakin besar. Dana Moneter Internasional (IMF) melaporkan bahwa lebih dari separuh negara-negara berkembang berpendapatan rendah berada dalam atau berisiko tinggi mengalami kesulitan utang, dan sekitar seperlima negara-negara berkembang memiliki perdagangan obligasi negara pada tingkat yang tertekan. Sementara itu, di banyak negara berpendapatan menengah ke bawah, meningkatnya kerentanan utang dan krisis yang saling

tumpang tindih – pandemi Covid-19, perang di Ukraina, dan kenaikan suku bunga global serta penghindaran risiko, memaksa semakin banyak negara untuk mencari utang restrukturisasi dari kreditor eksternal.

Sementara itu Bank Dunia mengungkapkan sepanjang 2022, negara-negara berpendapatan rendah dan menengah mengeluarkan dana hingga US$443,5 miliar untuk membayar utang.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Biaya utang atas utang publik dan utang yang dijamin publik pun diproyeksikan akan meningkat 10% untuk semua negara berkembang selama periode 2023-2024 dan hampir 40% untuk negara-negara berpendapatan rendah. Kondisi ini pun memaksa pemerintah untuk mengalihkan anggaran dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan penting lainnya.

Bank Dunia secara umum menyebutkan krisis utang tersebut mengancam negara-negara berkembang, yang mencakup negara berpendapatan rendah dan menengah. Namun, meskipun Indonesia berada dalam kelompok negara berpendapatan menengah, profil utang RI masih relatif aman.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan posisi utang Indonesia hingga akhir November 2023 sebesar Rp8.041,01 triliun. Naik tipis dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar Rp7.950,52 triliun. Jumlah utang Pemerintah pada periode ini mencapai Rp8.041,01 triliun dengan rasio utang terhadap PDB 38,11%.

Pemerintah memastikan rasio ini masih jauh dari ketetapan UU Nomor 1 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan rasio utang pemerintah adalah maksimal 60% dari PDB. Selain itu, rasio ini juga masih di bawah target yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah periode 2023-2026 di kisaran 40%.

https://jdih.pemalangkab.go.id

5. Konfrontasi Geo Ekonomi

Dunia yang semakin terhubung membawa peluang bagi kemakmuran yang lebih besar, namun juga persaingan ekonomi yang lebih besar antar negara. Mulai dari pandemi Covid-19, penyumbatan Terusan Suez, hingga perang di Ukraina, peristiwa-peristiwa tertentu dapat menimbulkan dampak yang besar di seluruh lanskap global. Hal ini menjadikan negara-negara di seluruh dunia telah mengambil serangkaian langkah kebijakan ekonomi baru untuk melindungi industri-industri utama dalam negeri dan memastikan pasokan bahan baku penting yang dapat diandalkan.

Geopolitik, yang merupakan kekuatan pendorong tradisional di balik kebijakan dan strategi luar negeri, akan digantikan oleh *geoekonomi.* Geoekonomi menyatakan bahwa negara harus menggunakan instrumen ekonomi dan kebijakan mereka seperti kebijakan investasi, pembatasan komoditas, dan sanksi keuangan untuk mencapai tujuan geopolitik, sehingga mendorong dan mengamankan kepentingan nasional.

6. Resiko Kegagalan *Cyber Security*

Keamanan siber telah menjadi isu prioritas seluruh negara di dunia semenjak teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, hukum, organisasi, kesehatan, pendidikan, budaya, pemerintahan, keamanan, pertahanan, dan lain sebagainya. Berbanding lurus dengan tingginya tingkat pemanfaatan

https://jdih.pemalangkab.go.id

teknologi informasi dan komunikasi tersebut, tingkat risiko dan ancaman penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi juga semakin tinggi dan semakin kompleks.

Menyikapi fenomena tersebut, untuk menciptakan lingkungan siber strategis dan penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, andal dan terpercaya; memajukan dan menumbuhkan ekonomi digital dengan meningkatkan daya saing dan inovasi siber; serta membangun kesadaran dan kepekaan terhadap ketahanan dan keamanan nasional dalam ruang siber, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan peraturan perubahannya Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 membentuk BSSN yang bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber nasional. BSSN menyusun Strategi Keamanan Siber Indonesia sebagai acuan bersama seluruh pemangku kepentingan keamanan siber nasional dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan keamanan siber di instansi masing-masing. Strategi keamanan siber nasional disusun selaras dengan nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu: Kedaulatan, Kemandirian, Keamanan, Kebersamaan, dan Adaptif.

Tujuan strategis Strategi Keamanan Siber Indonesia adalah tercapainya ketahanan siber, keamanan layanan

https://jdih.pemalangkab.go.id

publik, penegakan hukum siber, budaya keamanan siber dan keamanan siber pada ekonomi digital. Strategi Keamanan Informasi Indonesia ini diharapkan dapat menjadi salah satu fondasi kepercayaan dunia kepada Indonesia dalam berbagai forum keamanan siber internasional. Strategi Keamanan Siber Indonesia merupakan sumbangsih Bangsa Indonesia dalam mendorong terciptanya perdamaian dunia.

7. **Hilangnya Keanekaragaman Hayati**

Hilangnya keanekaragaman hayati terjadi ketika setiap bentuk keanekaragaman hayati (seperti keanekaragaman genetik, spesies, dan ekosistem) mengalami penurunan di suatu wilayah tertentu melalui proses seperti kematian (termasuk kepunahan), perusakan, atau pemindahan manusia.

Penurunan terjadi dalam berbagai skala, mulai dari kepunahan global hingga kepunahan populasi, yang menyebabkan penurunan total keragaman dalam skala yang sama.

Keanekaragaman hayati menciptakan nilai ekonomi yang signifikan dalam bentuk jasa ekosistem seperti penyediaan makanan, penyimpanan karbon, serta penyaringan air dan udara, yang bernilai lebih dari $150 triliun per tahun—sekitar dua kali lipat PDB dunia menurut penelitian akademis dan analisis BCG.

Lima tekanan utama—perubahan tata guna lahan dan laut, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, perubahan iklim, polusi, dan penyebaran spesies invasif—menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dalam jumlah besar. Penurunan fungsi ekosistem telah merugikan perekonomian global lebih dari $5

https://jdih.pemalangkab.go.id

triliun per tahun dalam bentuk hilangnya jasa alam.

Banyak aktivitas bisnis, terutama aktivitas yang berkaitan dengan ekstraksi sumber daya dan budidaya, berkontribusi terhadap tekanan yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Pengoperasian empat rantai nilai utama makanan, energi, infrastruktur, dan fesyen saat ini mendorong lebih dari 90% tekanan yang disebabkan oleh aktivitas manusia terhadap keanekaragaman hayati.

Ketika ekosistem menurun, dunia usaha menghadapi risiko yang signifikan, termasuk biaya bahan baku yang lebih tinggi dan penolakan dari konsumen dan investor. Namun krisis ini juga menciptakan peluang nyata. Perusahaan yang bertindak untuk mendukung keanekaragaman hayati dapat mengembangkan penawaran dan model bisnis baru yang kuat, meningkatkan daya tarik penawaran yang sudah ada, dan menurunkan biaya operasional.

8. Asset *Bubble Burst*

Bubble burst atau pecahnya gelembung perusahaan pada umumnya terjadi di dunia startup atau perusahaan rintisan. Bubble burst merupakan sebuah fenomena pertumbuhan ekonomi, dimana nilai pasar naik dengan sangat cepat, namun diikuti juga oleh penurunan nilai yang cepat atau kontraksi.

Fenomena bubble sendiri ditandai dengan kenaikan harga aset secara drastis disebabkan perilaku pasar yang tidak rasional, cenderung terlalu optimistis dan bersifat spekulatif. Selama

https://jdih.pemalangkab.go.id

fenomena bubble terjadi, harga aset diperdagangkan dengan harga yang relatif lebih 'mahal' (overvalued) daripada nilai wajarnya. Karena perilaku yang bersifat spekulatif inilah, di kemudian hari memungkinkan terjadinya bubble burst (gelembung pecah) yang ditandai dengan turunnya harga secara drastis dalam waktu yang sangat singkat.

Akibatnya adalah ramai gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menghantam perusahaan startup Indonesia. Peristiwa gelombang PHK ini dilakukan oleh para perusahaan startup untuk terus bertahan di tengah perekonomian maupun investasi yang memiliki siklus naik turun akibat resesi global. Dimana, pada siklus naik turun ini dapat terjadi fenomena menarik yaitu bubble and burst.

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.2.2. Telaah Isu Strategis berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB) merupakan kelanjutan dari program *Millenium Development Goals* (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. Konsep SDG's diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDG'S, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator. Adapun tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) di Tahun 2016-2030 antara lain:

1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana- mana.
2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan.
3) Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia.
4) Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua.
5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
6) Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang

https://jdih.pemalangkab.go.id

berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua.

7) Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8) Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua.
9) Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi.
10) Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara;
11) Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
12) Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14) Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan.
15) Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menggantikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.
16) Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. d
17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Di setiap negara, tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi juga negara maju, rumusan SDGs merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan demi membuat kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik. Di Indonesia khususnya Kabupaten Pemalang, rumusan SDGs dan target pencapaian dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.6.6.3. Telaah Isu Strategis berdasarkan RPJM Nasional tahun 2025-2029

Tema dan arah kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029 adalah "Penguatan Fondasi Transformasi" dengan menekankan pada :

1. Transformasisosial yaitu pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.
2. Transformasi ekonomi yaitu hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola yaitu kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia yaitu memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan sosial, budaya dan ekologi yaitu memperkuat ketahanan sosial, budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Berdasarkan hasil evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2023, Rancangan Teknokratik RPJM Nasional tahun 2025- 2029 membagi isu strategis kewilayahan khususnya wilayah Jawa Bali yang harus dipedomani dalam Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya kesenjangan pembangunan

https://jdih.pemalangkab.go.id

antarwilayah karena persebaran pusat ekonomi yang tidak merata antara Utara dan Selatan, Barat dan Timur (Bali), serta daerah kepulauan

2. Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti banjir rob di daerah pesisir utara pulau Jawa, gempa bumi, dan tsunami di daerah pesisir selatan pulau Jawa.
3. Degradasi lingkungan seperti penurunan muka tanah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan polusi udara akibat aktivitas industri
4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengembangan sektor pertanian
5. Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya mismatch antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri
6. Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan jumlah penduduk miskin serta scarring effect akibat pandemi COVID- 19.

2.2.2.4. Telaah Isu Strategis berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Penelaahan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Pemalang dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2025 bertujuan untuk menyelaraskan dan menjabarkan RPJMD Kabupaten Pemalang sehingga dapat memberikan sumbangsih positif pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah. Adapun visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi

https://jdih.pemalangkab.go.id

Jawa Tengah tahun 2025-2029 adalah "Jawa Tengah Sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional Yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan".

Isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan
2. Penurunan tingkat kemiskinan
3. Ketahanan pangan berkelanjutan
4. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
5. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana
6. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia
7. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat.
8. Tata kelola pemerintahan yang dinamis

2.2.2.5. Telaah Isu Strategis berdasarkan RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pemalang adalah "Pemalang Mulya (Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya)".

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 sebagai berikut :

1. Transformasi Ekonomi

   Transformasi ekonomi di Kabupaten Pemalang diharapkan dapat menggeser struktur ekonomi

https://jdih.pemalangkab.go.id

yang semula berbasis komoditas, menjadi ekonomi berbasis investasi, produksi, dan pelayanan yang memiliki nilai tambah tinggi.

2. Transformasi sosial

   Transformasi sosial di Kabupaten Pemalang dapat diwujudkan melalui kesejahteraan masyarakat dengan terjaminnya hak dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan dan sosial serta terjaminnya keamanan dan ketentraman masyarakat. Selain itu, aspek lainnya adalah penurunan kemiskinan yang berorientasi pada kemajuan ekonomi kerakyatan.

3. Insrastruktur yang Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan Pembangunan infrastruktur dilakukan dengan harapan sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan, sekaligus bentuk investasi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saingyang dapat menunjang ketercapaian visi pembangunan jangka panjang.

4. Ketahanan SDA, Lingkungan Hidup dan Bencana

   Misi ini bertujuan untuk menciptakan kesiapsiagaan peran sumber daya alam dan sumber daya buatan dalam usaha pertahanan dan meningkatkan potensi serta kapasitas kekuatan pertahanan daerah.

5. Ketahanan Budaya

   Makna dalam misi ini adalah pemajuan kebudayaan yaitu upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kabupaten Pemalang di tengah peradaban dunia

melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

6. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan

   Misi ini merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Isu Strategis Daerah yang dihadapi dalam pembangunan jangka panjang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 adalah :

1. Pemanfaatan Bonus Demografi dalam mewujudkan SDM yang berdaya saing dan adaptif
2. Antisipasi masuknya budaya asing yang merusak kearifan budaya lokal dan norma masyarakat, khususnya generasi muda
3. Akselerasi pengentasan kemiskinan
4. Penguatan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan.
5. Stabilitas ketahanan pangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat
6. Pemerataan infrastruktur pembangunan dan penataan kota yang berkualitas
7. Implementasi reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.2.2.6. Telaah Isu Strategis Berdasarkan KLHS RPJM Kabupaten Pemalang Tahun 2023

Penyusunan KLHS telah diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dimana KLHS wajib disusun dan diintegrasikan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan rencana pembangunan jangka Panjang (RPJP), serta dalam penyusunan KRP terindikasi menimbulkan dampak atau berisiko terhadap lingkungan.

Isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJM Kabupaten Pemalang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Kualitas hidup sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan
2. Belum optimalnya distribusi kesejahteraan dengan dukungan kepastian hukum yang adil dan berbasis gender
3. Ancaman keberlanjutan sumber daya air
4. Ancaman terhadap pelestarian tutupan hutan dan lahan
5. Peningkatan ancaman risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim
6. Belum optimalnya kontribusi industri dan pariwisata terhadap ekonomi daerah yang berkelanjutan
7. Belum optimalnya budaya e-governmentdan upaya peningkatan pendapatan daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.74.

Keterkaitan Isu Strategis Kabupaten Pemalang Dengan Isu Strategis Internasional, Nasional Dan Regional Jawa Tengah

Potensi	Permasalahan Masalah Daerah	Isu Global	Isu Strategis Rencana Jangka Panjang			Isu Strategis Jangka Menengah		Isu Strategis Kabupaten Pemalang
			Nasional	Jawa Tengah	Pemalang	Nasional	KLHS	
- Lahan Pertanian yang luas - Pemalang merupakan lumbung pangan Jawa TEngah	- Alih fungsi lahan pertanian - Belum terwujudnya ketahanan pangan	- Ketahanan pangan - Pola konsumsi dan produksi berkelanjuta n		- Ketahanan pangan	- Ketahanan pangan	- Belum optimalnya teknologi pertanian		1. Ketahanan Pangan dalam memenuhi ketersediaan pangan masyarakat

https://jdih.pemalangkab.go.id

- Telah tersedianya infrastruktur penghubung virtual seperti internet dan telekomunikasi, kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan air bersih. Infrastruktur pertanian dan juga jaringan jalan yang menyebar.	- Masih rendahnya kualitas infrastruktur jalan, air dan pengelolaan limbah - Relatif stagnannya tingkat konektivitas Kabupaten Pemalang - Belum optimalnya pengelolaan arsip dan kurangnya sarana prasarananya - Masih kurangnya sarana prasarana yang mendukung dalam penanganan ikan dan rendahnya angka konsumsi ikan - Belum memadainya	- Infrastruktur tangguh	- Infrastruktur dan literasi digital rendah - Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa	- Penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas	- Pemerataan infrastruktur	- Kesenjangan pembangunan antar wilayah		2. Pemerataan pembangun an infrastruktu r dan penataan kota berkualitas

https://jdih.pemalangkab.go.id

Potensi	Permasalahan Masalah Daerah	Isu Global	Isu Strategis Rencana Jangka Panjang			Isu Strategis Jangka Menengah		Isu Strategis Kabupaten Pemalang
			Nasional	Jawa Tengah	Pemalang	Nasional	KLHS	
	sarana prasarana pertanian dan tingginya angka penggunaan pupuk anorganik oleh petani - Fasilitas wilayah/ infrastruktur - Rendahnya rasio belanja modal							
- Terdapat 3 pilar yang menjadi kunci dalam perwujudan ekonomi hijau di Kabupaten Pemalang yaitu pilar ekonomi, pilar sosial dan pilar lingkungan	- Tingginya potensi rawan bencana - Kurang ter edukasinya masyarakat mengenai pelestarian lingkungan hidup - Penurunan pertumbuhan ekonomi - Tingginya laju inflasi - Belum optimalnya pemanfaatan tanah peruntukan - Belum optimalnya sarana prasarana penunjang kegiatan penanaman modal - Belum optimalnya pengembangan pariwisata - Masih rendahnya	- Resiko kegagalan Climate Action - Hilangnya keanekaragaman hayati - Pengelolaan air dan sanitasi - Permukiman berkelanjutan - Perubahan iklim - Pelestarian sumberdaya kelautan - Pemulihan ekosistem darat - Deglobalisasi - Konfrontasi geoekonomi	- Pembangunan belum berkelanjutan - Deindustrialisasi dini - Pariwisata di bawah potensinya - Ekonomi laut belum optimal - Kontribusi UMKM dan koperasi kecil	- Penanggulangan bencana - Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	- Penguatan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan	- Potensi bencana - Degradasi lingkungan	- Ancaman keberlanjutan SDA - Pelestarian tutupan hutan dan lahan - Risiko bencana dan perubahan iklim - Belum optimalnya kontribusi industri dan pariwisata terhadap ekonomi daerah	3. Perkuatan fondasi ekonomi hijau dan penanggulangan risiko bencana

https://jdih.pemalangkab.go.id

Potensi	Permasalahan Masalah Daerah	Isu Global	Isu Strategis Rencana Jangka Panjang			Isu Strategis Jangka Menengah		Isu Strategis Kabupaten Pemalang
			Nasional	Jawa Tengah	Pemalang	Nasional	KLHS	
	pengawasan dan fasilitas yang diberikan pada pelaku usaha - Belum maksimalnya fasilitas untuk industri kecil menengah - Kemampuan ekonomi daerah - Iklim investasi - Indeks daya saing daerah - Rendahnya rasio kemandirian daerah	- Asset Bubble Burst - Revitalisasi kemitraan global						
- Sarana Prasarana pendidikan dan kesehatan yang telah menyebar hampir keseluruh wilayah. - Bonus demografi	- Rendahnya IPM - Rendahnya IPG - Tingginya TPT - Belum maksimalnya partisipasi sekolah - Belum optimalnya layanan kesehatan - Masih belum optimalnya pemberdayaan SDM - Masih rendahnya kualifikasi SDM dan belum optimalnya	- Krisis lapangan pekerjaan - Kesehatan - Pendidikan - Kesetaraan gender - Kesempatan kerja	- Produktivitas rendah - Kualitas SDM yang makin rendah	- Daya saing SDM	- Pemanfaatan bonus demografi dalam mewujudkan SDM yang berdaya saing	- Tingkat penganggura n tinggi	- Peningkatan kualitas hidup SDM	4. Sumberdaya manusia yang berdaya saing, berkualitas dan berkarakter

https://jdih.pemalangkab.go.id

Potensi	Permasalahan Masalah Daerah	Isu Global	Isu Strategis Rencana Jangka Panjang			Isu Strategis Jangka Menengah		Isu Strategis Kabupaten Pemalang
			Nasional	Jawa Tengah	Pemalang	Nasional	KLHS	
	penerapan peraturan ketenagakerjaan - Masih minimnya perlindungan bagi anak dan perempuan - Belum optimalnya program KB - Belum optimalnya penduduk yang mengakses informasi publik - Kurangnya kompetensi SDM dan kesadaran legalitas usaha - Kurangnya peran pemuda dalam pembangunan perekonomian - Sumberdaya manusia							
- Adanya kolaborasi yang terarah antara stakeholder dalam penanganan	- Rendahnya pendapatan perkapita - Tingginya tingkat kemiskinan - Masih belum	- Kemiskinan - Kesenjangan			- Pengentasan kemiskinan	- Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan	- Belum optimalnya distribusi kesejahteraan	5. Akselerasi penguatan kemiskinan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Potensi	Permasalahan Masalah Daerah	Isu Global	Isu Strategis Rencana Jangka Panjang			Isu Strategis Jangka Menengah		Isu Strategis Kabupaten Pemalang
			Nasional	Jawa Tengah	Pemalang	Nasional	KLHS	
kemiskinan	optimalnya penannganan RTLH dan permukiman kumuh - Belum terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang membutuhkan							
- Adanya komitmrn dari pimpinan daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. - Digitalisasi pelayanan publik	- Menurunnya IRB - Masih rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan - Belum optimalnya penataan desa - Belum optimalnya data statistik yang dimiliki - Masih kurangnya tingkat keamanan informasi pemerintahan - Kurangnya pelestarian warisan budaya - Belum optimalnya sarana dan prasarana perpustakaan - Belum optimalnya koordinasi antar	- Krisis utang - Cyber security	- Tata kelola pemerintahan belum optimal - Kepastian dan penegakan hukum masih lemah - Demokratisasi belum optimal	- Tata kelola pemerintahan yang dinamis	- Reformasi birokrasi		- Belum optimalnya budaya e-government	6. Reformasi tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi

https://jdih.pemalangkab.go.id

Potensi	Permasalahan Masalah Daerah	Isu Global	Isu Strategis Rencana Jangka Panjang			Isu Strategis Jangka Menengah		Isu Strategis Kabupaten Pemalang
			Nasional	Jawa Tengah	Pemalang	Nasional	KLHS	
	Bidang - Belum optimalnya dukungan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan kurangnya kualitas SDM yang sesuai kompetensinya - Belum optimalnya kualitas SDM dan perencanaannya - Masih rendahnya PAD pajak daerah yang diterima namun angka belanja daerah tinggi - Belum maksimalnya administrasi kepegawaian - Masih kurangnya pemandaatan hasil penelitian dan pengembangan - Belum optimalnya penyelenggaraan pengawasan - Belum optimalnya pelayaan publik dan masih kurangnya SDM yang kompeten							

https://jdih.pemalangkab.go.id

Potensi	Permasalahan Masalah Daerah	Isu Global	Isu Strategis Rencana Jangka Panjang			Isu Strategis Jangka Menengah		Isu Strategis Kabupaten Pemalang
			Nasional	Jawa Tengah	Pemalang	Nasional	KLHS	
	- Rasio belanja pegawai							
- Adanya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan secara sistematis serta berkelanjutan di bidang kebudayaan. -	- Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesatuan bangsa dan politik	- Masyarakat damai		- Kekuatan budaya	- Antisipasi masuknya budaya asing yang merusak			7. Penguatan ketahanan budaya

https://jdih.pemalangkab.go.id

Setelah mempertimbangkan berbagai isu strategis global, Nasional, dan Provinsi Jawa Tengah, dan memperhatikan potensi, peluang dan tantangan yang ada di Kabupaten Pemalang, dirumuskan isu strategis Kabupaten Pemalang selama 5 tahun ke depan (2025-2029). Isu strategis Kabupaten Pemalang untuk lima tahun ke depan difokuskan pada Perkuatan Fondasi Transformasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut adalah sebagai berikut.

1. **Ketahanan Pangan dalam Memenuhi Ketersediaan Pangan Masyarakat**

   Pangan merupakan isu strategis di masa sekarang dan masa yang akan datang. Sebab, pangan, baik dari sisi produksi, distribusi, maupun konsumsi, sangat erat kaitannya dengan dimensi sosial, ekonomi, dan politik rakyat. Hal ini menjadikan pangan merupakan urusan yang sangat strategis dan kompleks, yang keberadaannya ikut menentukan masa depan bangsa dan negara. Ketahanan pangan tentu menjadi kunci untuk menghadapi ancaman krisis pangan di masa depan.

   Ancaman ketahanan pangan di Kabupaten Pemalang adalah alih fungsi lahan pertanian yang dapat menyebabkan menurunnya produktivitas pangan sehingga hasil produksi pangan juga menurun. Peningkatan jumlah penduduk, jumlah industri serta peningkatan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penyebab yang tidak dapat dihindari sehingga perlu upaya untuk melindungi kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan paling sedikit seluas ± 34.299 hektar. Upaya ini harus dimaksimalkan dengan mengkolaborasikannya dengan peguatan ekonomi hijau dan pembangunan

https://jdih.pemalangkab.go.id

berkelanjutan.

Penguatan fondasi Ketahanan Pangan Dalam Memenuhi Ketersediaan Pangan Masyarakat harus diarahkan guna menjamin ketahanan dan kedaulatan pangan. Pemerintah Daerah harus berupaya mencapai swasembada dan mempertahankan swasembada berkelanjutan bagi komoditas pangan strategis melalui sinergi dan keterpaduan antar sektor sehingga tujuan pembangunan ketahanan pangan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Distribusi pangan diarahkan guna menjamin ketersediaan pangan selalu dalam kondisi yang cukup, memadai dan dikelola dengan baik ditandai dengan stabilitas harga pangan yang terjangkau bagi konsumen namun disisi lain juga memberikan penghasilan yang memadai bagi petani. Sedangkan konsumsi diarahkan untuk memperbaiki kualitas konsumsi pangan masyarakat, khususnya melalui penganeka ragaman konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya lokal termasuk meningkatkan aspek keamanan pangan. Kekayaan sumberdaya hayati perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan keragaman konsumsi pangan masyarakat sekaligus mengatasi ketergantungan pada beras.

1. **Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Kota Berkualitas**

   Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pangan, air, dan energi bagi penduduk Kabupaten Pemalang yang terus bertambah dan untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Infrastruktur mampu menciptakan *multiplier effect*, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di antaranya dengan menciptakan lapangan

https://jdih.pemalangkab.go.id

kerja dan titik pertumbuhan ekonomi baru, membuka jaringan logistik ke sentra-sentra produksi.

Guna mendukung pemerataan ekonomi di Kabupaten Pemalang, pembangunan infrastruktur diarahkan pada konektivitas fisik dan infrastruktur penghubung virtual seperti internet dan telekomunikasi harus menjadi perhatian. Tak hanya itu, infrastruktur lain yang berkaitan dengan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan air bersih ikut menjadi salah satu instrumen mengurangi kesenjangan.

Pembangunan infrastruktur juga harus mampu mewujudkan Kota Berkualitas bagi masyarakat untuk melindungi kesehatannya, menyediakan lingkungan, menawarkan kesempatan untuk bekerja dan mengekspresikan budayanya.

2. **Perkuatan Fondasi Pembangunan Ekonomi Hijau dan Penanggulangan Risiko Bencana**

   Ekonomi hijau adalah konsep ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat sekaligus mengurangi resiko kerusakan lingkungan. Atau dengan kata lain sistem ekonomi yang berusaha mengurangi emisi karbon dan dampak negatif lainnya terhadap lingkungan. Hal ini dapat dicapai dengan penggunaan sumberdaya yang lebih hemat, mengurangi limbah dan polusi serta mempromosikan energi terbarukan dan teknologi bersih.Dalam rangka perkuatan fondasi pembangunan ekonomi hijau untuk mendukung pembangunan berkelanjutan terdapat 3 pilar yang menjadi kunci dalam perwujudan ekonomi hijau di Kabupaten Pemalang yaitu pilar ekonomi, pilar sosial dan pilar lingkungan. Melalui 3 pilar ekonomi hijau ini selain dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir ekonomi juga

https://jdih.pemalangkab.go.id

diharapkan memberikan dampak tercapainya keadilan baik keadilan bagi masyarakat maupun lingkungan serta sumber daya alam itu sendiri. Sementara itu, sebagai kabupaten dengan risiko tinggi terhadap bencana menunjukkan bahwa bencana di Kabupaten Pemalang sebagian besar merupakan bencana hidrometeorologi baik banjir maupun kekeringan di mana bencana hidrometeorologi erat kaitannya dengan aktivitas manusia dan ekonomi serta perubahan iklim. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi hijau perlu dikedepankan oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, untuk mencegah kerusakan lingkungan serta mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.

3. **Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing, Berkualitas dan Berkarakter**

   Pembangunan manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah Kabupaten Pemalang. Dengan kualitas SDM unggul diharapkan mampu mencetak generasi yang berdaya saing, berkualitas dan berkarakter. Kemampuan SDM untuk berdaya saing menjadi tuntutan dalam dunia kerja untuk memenuhi pasar kerja dan dunia usaha. Sementara kemampuan profesional dan kematangan kepribadian saling memperkuat satu sama lain. Profesionalisme dapat turut membentuk karakter sikap dan perilaku serta kepribadian yang tangguh, sementara kepribadian yang tangguh merupakan prasyarat dalam membentuk profesionalisme. Minimal ada empat kebijakan pokok dalam upaya penguatan fondasi Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing,

https://jdih.pemalangkab.go.id

Berkualitas dan Berkarakter yaitu :

a. Peningkatan kualitas hidup manusianya seperti jasmani dan rohani, serta kualitas. kehidupannya seperti perumahan dan pemukiman yang sehat.
b. Peningkatan kualitas SDM yang produktif dan upaya pemerataan penyebarannya.
c. Peningkatan kualitas SDM yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai IPTEK yang berwawasan lingkungan
d. Pengembangan pranata yang meliputi kelembagaan dan peran hukum yang mendukung upaya peningkatan kualitas SDM

5. Akselerasi Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Pemalang yang masih berada di angka 15,03% memerlukan upaya yang mampu mengakselerasi dari beberapa bidang aspek dalam pembangunan daerah untuk berkolaborasi, berkerjasama dalam pengentasan kemiskinan.

Akselerasi ini dilakukan dengan menurunkan beban pengeluaran masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial yang tepat sasaran, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat serta meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak dan peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan

https://jdih.pemalangkab.go.id

sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

6. **Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digitalisasi**

   Teknologi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah, diera sekarang ini, merupakan sebuah keharusan dilakukan atau dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah dalam melakukan pelayanan publik. Rendahnya transparansi Pemerintahan Daerah sebenarnya dapat diperbaiki dengan menggunakan sistem digital dalam tata kelola pemerintahannya.

   Penerapan digital teknologi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, seperti penerapan/implementasi KTP Elektronik (e-ktp), e-budgeting, e-planning dan lain-lain merupakan wujud dari tujuan pemerintah untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.

7. **Penguatan Ketahanan Budaya Masyarakat**

   Dampak globalisasi terhadap kebudayaan terasa langsung pada kehidupan budaya masyarakat urban. Di lingkungan perkotaan, masyarakat dihadapkan pada sebuah tegangan yakni terasing dari budaya tradisi yang menjadi akar masyarakat, namun di sisi lain, masyarakat tidak sepenuhnya terserap dalam budaya global. Pada situasi seperti itu, masyarakat rentan mengalami krisis jatidiri dan kehilangan pegangan hidup yang dahulu disediakan oleh budaya tradisi. Bahkan situasi ini dapat memicu konflik identitas yang bisa berujung secara ekstrem pada pengerasan identitas primordial dan fanatisme.Upaya membangun ketahanan budaya di era globalisasi ini tak ada lain adalah dengan membuat budaya tradisi lokal tetap relevan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu menjawab

https://jdih.pemalangkab.go.id

kebutuhan nyata di lingkungannya dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Tantangan membangun ketahanan budaya di era globalisasi terletak pada peningkatan relevansi budaya tradisi melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan secara sistematis serta berkelanjutan di bidang kebudayaan.

Isu strategis untuk kecamatan Ulujami terkait KLHS di dalam RPJMD Kabupaten Pemalang adalah Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digitalisasi

Teknologi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah, diera sekarang ini, merupakan sebuah keharusan dilakukan atau dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah dalam melakukan pelayanan publik. Rendahnya transparansi Pemerintahan Daerah sebenarnya dapat diperbaiki dengan menggunakan sistem digital dalam tata kelola pemerintahannya.

Penerapan digital teknologi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, seperti penerapan/implementasi KTP Elektronik (e-ktp), e-budgeting, e-planning dan lain-lain merupakan wujud dari tujuan pemerintah untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Ulujami

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
- Adanya komitmrn dari pimpinan daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. - Digitalisasi pelayanan publik	- Belum optimalnya pelayaan publik dan masih kurangnya SDM yang kompeten -	-Belum optimalnya budaya e-governmen t	- Krisis utang - Cyber security	- Tata kelola pemerintahan belum optimal - Kepastian dan penegakan hukum masih lemah - Demokratisas i belum optimal	- Tata kelola pemerintaha n yang dinamis	- Reformasi tata kelola pemerintaha n berbasis digitalisasi

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Kecamatan Ulujami dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang pelayanan publik, maka Kecamatan Ulujami harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Kecamatan Ulujami secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat secara umum.

3.1. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Ulujami selama tahun 2025–2029., maka dapat dirumuskan tujuan Renstra Kecamatan Ulujami sebagai berikut :

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ulujami sebagai PD yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

3.2. Sasaran

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Ulujami dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Ulujami selama tahun 2025-2029, adalah "**Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan** ".

Sasaran tersebut diukur dengan indikator :

Jumlah desa di kecamatan yang memiliki status desa mandiri/jumlah desa yang ada di kecamatan tersebut dikali 100

Adapun Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ulujami dapat dilihat alam Tabel III.1. sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel III.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Ulujami

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan	Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan	Jumlah desa di kecamatan yang memiliki status desa mandiri/jumlah desa yang ada di kecamatan tersebut dikali 100	33,33	44,44	55,55	66,66	77,77	88,88	
		Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah	IKM	88,85	88,86	88,87	88,88	88,89	88,9	
			NILAI SAKIP	60,05	60,1	60,15	60,25	60,35	60,50	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Meningkatnya kualitas penyeelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persesntase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	87	87	87	87	87	87	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	80	83	83	89	89	94	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	100	100	100	100	100	100	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	100	100	100	100	100	100	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase kesesuaian RKPDes dan RPJMDes dengan RPJMD	77,77	83,33	83,33	88,88	88,88	94,44	

Ket: Dalam penentuan target tahun 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline.

https://jdih.pemalangkab.go.id

3.3. Strategis

1. Strategi Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 adalah rencana mengoptimalisasikan sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Kecamatan Ulujami.
2. Strategi Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 untuk mencapai Tujuan dan Sasaran kecamatan Ulujami adalah sebagai berikut :
   a) Menciptakan budaya dan lingkungan kerja yang bersih dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi, nyaman, dan murah
   b) Meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi dengan meningkatkan kualitas pelayanan public yang difokuskan pada pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan kepuasaan pada Masyarakat.
   c) memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar berupa meningkatkan tata kelola arsitektur SPBE, mendorong kualitas SMART City, dan kualitas layanan aduan masyarakat

Tabel III.2 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan sarana dan Prasarana Publik berupa ruang laktasi dan ramah disabilitas	Meningkatkan Pelayanan Publlik	Meningkatkan Pelayanan Publlik	Meningkatkan Pelayanan Publlik	Meningkatkan Pelayanan Publlik

https://jdih.pemalangkab.go.id

1.4.Arah Kebijakan

Visi, Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor- faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Ulujami yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 adalah :

"**PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA**"

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Bersih

Bersih Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan.

Cakap

Cakap dimaknai memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang

https://jdih.pemalangkab.go.id

menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.

Handal

Handal dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.

MULYA

MULYA: Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapka 8 (delapan) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. **Misi 1 Resik**: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih.

   Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik

https://jdih.pemalangkab.go.id

2. **Misi 2 Hijau**: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sector unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau, yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan) yang ramah lingkungan, industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM dimasyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.

3. **Misi 3 Apik**: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penaatan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dari Desa

4. **Misi 4 Peduli**: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi

5. **Misi 5 Silaturahmi**: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong,tepa selira dan sejahtera

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, dan saling

https://jdih.pemalangkab.go.id

menghormati dan teposliro;

6. **Misi 6 Organisatoris**: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan *Good Governance, Clean Governance* dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.
7. **Misi 7 Digitalisasi**: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi
8. **Misi 8 Ikhlas**: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkan kearifan dan budaya lokal.

Keterkaitan Visi dengan Misi adalah sebagai berikut:

Frase Bersih dan Handal dalam Visi akan dicapai dengan **Misi 1 Resik**: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih; **Misi 6 Organisatoris**: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi dan **Misi 7 Digitalisasi**: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam

https://jdih.pemalangkab.go.id

memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar

Frase Cakap dalam Visi akan dicapai dengan **Misi 2 Hijau**: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan; **Misi 3 Apik**: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah dan **Misi 4 Peduli**: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat.

Frase MULYA dalam Visi akan dicapai dengan **Misi 5 Silaturahmi**: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong,tepa selira dan sejahtera dan **Misi 8 Ikhlas**: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan.

Sebagai mana telah diuraikan di atas bahwa visi, misi, program RPJMD 2025-2029 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Pemalang dalam 5 (lima) tahun ke depan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Kecamatan Ulujami sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program Kecamatan Ulujami tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan

https://jdih.pemalangkab.go.id

pelayanan pada Kecamatan Ulujami, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati

Misi/ Program Prioritas	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
Visi : Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Bercahaya: Bersih,Cakap, Handal dan				
Resik : Menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih	1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa 3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraa n ketentraman dan ketertiban umum 4. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan Perda dan	1. Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia 2. Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan 3. Belum	1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/keluraha n untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan	1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyara kat 2. Adanya PD dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaa n masyarakat desa/kelurah an 3. Adanya Linmas

https://jdih.pemalangkab.go.id

Misi/ Program Prioritas	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong

https://jdih.pemalangkab.go.id

	Perbup 5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh PD di tingkat kecamatan 7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa dan kelurahan 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan 9. Pelaksanaan administrasi kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya	Optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan 4. Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan 5. Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik 6. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja 7. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan 4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan 5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahanan 6. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran 7. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan	yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan 4. Adanya FKDM dan Forkompimcam yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan 5. Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa 6. Adanya pendampingan dari PD terkait 7. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

https://jdih.pemalangkab.go.id

Misi/ Program Prioritas	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
Resik : Menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih	1. Peningkatan kualitas kebijakan dan pelaporan daerah difokuskan pada peningkatan kemantapan kelembagaan, kebijakan yang mampu menyelesaikan problem daerah dan pro rakyat, peningkatan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi, nyaman, dan murah; 2. Peningkatan mengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui optimalisasi pemanfaatan			
Organisatoris: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi	Peningkatan kualitas pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan kepuasaan pada			

https://jdih.pemalangkab.go.id

Digitalisasi: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar	1. Peningkatan kualitas digitalisasi pelayanan pemerintahan difokuskan pada peningkatan tata kelola arsitektur SPBE, mendorong kualitas SMART City, dan kualitas layanan aduan masyarakat; 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan kepuasaan pada masyarakat			

Rumusan Tujuan untuk mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih sehat dan nyaman.
2. Meningkatkan daya saing pembangunan daerah.
3. Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
4. Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, yang menciptakan keamanan dengan nilai nilai budaya dan kegotong-royongan.
5. Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel.

Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Sasaran pembangunan jangka menengah adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1 Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih

https://jdih.pemalangkab.go.id

sehat dan nyaman dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan serta pengelolaan sampah

2. Tujuan 2 Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel dengan sasaran sebagai berikut:
   - Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik
3. Tujuan 3 Meningkatkan daya saing pembangunan daerah dengan sasaran sebagai berikut:
   a. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi lokal
   b. Meningkatnya kualitas SDM daerah
   c. Meningkatnya kemandirian pangan
   d. Meningkatnya pengendalian harga bahan pokok dan penting
   e. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata
   f. Meningkatnya kualitas pembangunan desa dan kawasan perdesaan
   g. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender
   h. Meningkatnya kualitas riset dan inovasi
4. Tujuan 4 Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dengan sasaran sebagai berikut:
   a. Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat
   b. Meningkatnya penanganan pengangguran
5. Tujuan 5 Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, yang menciptakan keamanan dengan nilai nilai budaya dan kegotong-royongan dengan sasaran sebagai berikut:
   a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hidup berdampingan secara harmonis dan kondusif

https://jdih.pemalangkab.go.id

b. Meningkatnyaketahanan daerah dalam menghadapi bencana
c. Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal

Berdasarkan analisa terhadap visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2025-2029 maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi Kecamatan Ulujami. Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Ulujami dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi, misi dan program prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang, antara lain:

1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya PD dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
3. Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa;
6. Adanya pendampingan dari PD terkait;
7. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Kecamatan Ulujami dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi, misi, dan program prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang, antara lain :

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, mudah dan transparan;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan;
6. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran
7. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan

https://jdih.pemalangkab.go.id

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan Kabupaten Pemalang sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kabupaten Pemalang. Penataan ruang daerah bertujuan untuk mewujudkan ruang daerah berbasis pertanian yang didukung oleh sektor perdagangan dan industri dalam sistem wilayah terpadu dan berkelanjutan. Adapun kebijakan yang diambil, meliputi : (1) pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan wilayah; (2) pengembangan prasarana daerah; (3) pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif; (4) pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; (5) pengembangan kawasan perdagangan yang mampu menjadi pusat pemasaran hasil komoditas daerah; (6)

https://jdih.pemalangkab.go.id

pengembangan industri; (7) pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir; (8) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan; dan (9) pengembangan kawasan strategis daerah.

Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Kecamatan Ulujami tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas. Hasil telaahan tersebut adalah Nihil.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Berdasarkan KLHS RPJM Kabupaten Pemalang Tahun 2023

Penyusunan KLHS telah diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dimana KLHS wajib disusun dan diintegrasikan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan rencana pembangunan jangka Panjang (RPJP), serta dalam penyusunan KRP terindikasi menimbulkan dampak atau berisiko terhadap lingkungan.

Isu strategis dalamKajianLingkunganHidup Strategis RPJM Kabupaten Pemalang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Kualitas hidup sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan
2. Belum optimalnya distribusi kesejahteraan dengan dukungan kepastian hukum yang adil dan berbasis gender
3. Ancaman keberlanjutan sumber daya air

https://jdih.pemalangkab.go.id

4. Ancaman terhadap pelestarian tutupan hutan dan lahan
5. Peningkatan ancaman risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim
6. Belum optimalnya kontribusi industri dan pariwisata terhadap ekonomi daerah yang berkelanjutan
7. Belum optimalnya budaya e-government dan upaya peningkatan pendapatan daerah

Terkait dengan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Kecamatan Ulujami tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas. Hasil telaahan tersebut adalah Nihil.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel III.3 Arah Kebijakan Renstra Keamatan Ulujami

NO	OPERASIONALISASI NPSK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KEC ULUJAMI	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas kebijakan dan pelaporan daerah difokuskan pada peningkatan kemantapan kelembagaan, kebijakan yang mampu menyelesaikan problem daerah dan pro rakyat, peningkatan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi, nyaman, dan murah; 2. Peningkatan mengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui optimalisasi pemanfaatan TPST;	**Misi 1 Resik** : Menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kab/Kota	Peningkatan kualitas pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan kepuasaan pada Masyarakat.	**Misi 6 Organisatoris**: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Peningkatan kualitas digitalisasi pelayanan pemerintahan difokuskan pada peningkatan tata kelola arsitektur SPBE, mendorong kualitas SMART City, dan kualitas layanan aduan masyarakat; 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan kepuasaan pada masyarakat	**Misi 7 Digitalisasi** : Digitalisasi: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN ,SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam rangka untuk mencapai tujuan, sasaran, outcome dan output maka disusun Program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Ulujami yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029 :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
      - Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

   c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
      - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

https://jdih.pemalangkab.go.id

d. Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
   - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
   - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
   - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kantor dan Bangunan Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
      - Sub Kegiattan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

   b. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
   - Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
   - Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
   - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
   c. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
   - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
   - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
      - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
      - Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
      - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

   b. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
      - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
      - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

https://jdih.pemalangkab.go.id

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
      - Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
   b. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
      - Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   a. Kegiatan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
      - Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
      - Sub Kegiatan Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan dan Nasional
      - Sub Kegiatan Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
      - Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintahan Desa
   a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
      - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
      - Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
      - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
      - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
      - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
      - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

https://jdih.pemalangkab.go.id

- Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Pencanaan Pembangunan Partisipatif
- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Adapun Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Renstra Kecamatan Ulujami, dapat dilihat dalam Tabel 4.1 sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra KecamatanUlujami

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan		Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan	Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan	Angka	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Sub Kegiatan	
		Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Nilai SKM	Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang	Nilai		
			Prosentase peningkatan status Desa maju menjadi Desa mandiri	Jumlah status desa maju yang akan ditingkatkan ke status desa mandiri dibagi jumlah desa maju di kecamatan x 100%	%		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						nan/Semesteran SKPD - Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD d. Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sub Kegiatan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Sub	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Re	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya kualitas penyeelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persesntase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	Jumlah kewenangan yang dilaksanakan dibagi seluruh kewenangan yang dilimpahkan x 100%	%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Sub Kegiattan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan b. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Daerah yang ada di Kecamatan - Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan - Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan c. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Dilimpahkan kepada Camat - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	Jumlah Desa / Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif dibagi jumlah seluruh desa x100%	%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani dibagi Jumlah gangguan x 100%	%	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan b. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
		Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	Jumlah konflik yang ditangani dibagi jumlah konflik yang muncul x 100%	%	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						- Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia - Sub Kegiatan Fasilitasi, koordinasi	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan dan Nasional - Sub Keg - Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase kesesuaian RKPDes dan RPJMDes dengan RPJMD	Jumlah Desa dengan RKPDes dan RPJMDes sesuai dengan RPJMD dibagi jumlah desa x 100%	%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						- Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa - Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Pencanaan Pembangunan Partisipatif - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Adapun Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Kecamatan Ulujami selama tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada Tabel 4.2. sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				3.455.919.322		3.299.362.075		3.299.362.075		3.299.362.075		3.299.362.075		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.745.167.322		3.177.264.175		3.177.264.175		3.177.264.175		3.177.264.175		
Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota (Ulujami)	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%)	100	100	2.745.167.322	100	3.177.264.175	100	3.177.264.175	100	3.177.264.175	100	3.177.264.175	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Ulujami	
	Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				18.364.000		18.364.000		18.364.000		18.364.000		18.364.000		
Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	18.364.000	1	18.364.000	1	18.364.000	1	18.364.000	1	18.364.000		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Perencanaan													

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4.343.000		4.343.000		4.343.000		4.343.000		4.343.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	4.343.000	4	4.343.000	4	4.343.000	4	4.343.000	4	4.343.000		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.021.000		3.021.000		3.021.000		3.021.000		3.021.000		
Tersusunnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	3.021.000	4	3.021.000	4	3.021.000	4	3.021.000	4	3.021.000		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
[illegible]	[illegible]													
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.130.588.000		2.565.684.853		2.565.684.853		2.565.684.853		2.565.684.853		
Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	2.130.588.000	1	2.565.684.853	1	2.565.684.853	1	2.565.684.853	1	2.565.684.853		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	14		14		14		14		14			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.123.588.000		2.559.184.853		2.559.184.853		2.559.184.853		2.559.184.853		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	14	2.123.588.000	14	2.559.184.853	14	2.559.184.853	14	2.559.184.853	14	2.559.184.853		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2.500.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	2.500.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan													

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				6.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20	20	6.000.000	20	3.000.000	20	3.000.000	20	3.000.000	20	3.000.000		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20	20		20		20		20		20			
7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				5.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20	20	5.000.000	20	2.000.000	20	2.000.000	20	2.000.000	20	2.000.000		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20	20	1.000.000	20	1.000.000	20	1.000.000	20	1.000.000	20	1.000.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				128.062.000		128.062.000		128.062.000		128.062.000		128.062.000		
Jumlah dokumen administrasi umum Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	128.062.000	12	128.062.000	12	128.062.000	12	128.062.000	12	128.062.000		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				99.667.000		99.667.000		99.667.000		99.667.000		99.667.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	99.667.000	12	99.667.000	12	99.667.000	12	99.667.000	12	99.667.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.895.000		4.895.000		4.895.000		4.895.000		4.895.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	4.895.000	12	4.895.000	12	4.895.000	12	4.895.000	12	4.895.000		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000		
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				34.715.000		34.715.000		34.715.000		34.715.000		34.715.000		
Jumlah unit Pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terbeli	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	6	34.715.000	6	34.715.000	6	34.715.000	6	34.715.000	6	34.715.000		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				34.715.000		34.715.000		34.715.000		34.715.000		34.715.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	6	34.715.000	6	34.715.000	6	34.715.000	6	34.715.000	6	34.715.000		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				147.338.322		147.338.322		147.338.322		147.338.322		147.338.322		
Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	147.338.322	12	147.338.322	12	147.338.322	12	147.338.322	12	147.338.322		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15.010.000		15.010.000		15.010.000		15.010.000		15.010.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	15.010.000	12	15.010.000	12	15.010.000	12	15.010.000	12	15.010.000		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				49.756.322		49.756.322		49.756.322		49.756.322		49.756.322		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	49.756.322	12	49.756.322	12	49.756.322	12	49.756.322	12	49.756.322		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				82.572.000		82.572.000		82.572.000		82.572.000		82.572.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	82.572.000	12	82.572.000	12	82.572.000	12	82.572.000	12	82.572.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				278.100.000		278.100.000		278.100.000		278.100.000		278.100.000		
Jumlah unit Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	4	4	278.100.000	4	278.100.000	4	278.100.000	4	278.100.000	4	278.100.000		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	14	14		14		14		14		14			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7	7		7		7		7		7			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				108.963.000		108.963.000		108.963.000		108.963.000		108.963.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	14	14	108.963.000	14	108.963.000	14	108.963.000	14	108.963.000	14	108.963.000		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	4	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7	7	7.000.000	7	7.000.000	7	7.000.000	7	7.000.000	7	7.000.000		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				147.137.000		147.137.000		147.137.000		147.137.000		147.137.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	147.137.000	2	147.137.000	2	147.137.000	2	147.137.000	2	147.137.000		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				24.993.000		16.195.500		16.195.500		16.195.500		16.195.500		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Ulujami)	Persentase Pelimpahan Kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakanÂ setiapÂ tahun (%)	87	87	24.993.000	87	16.195.500	87	16.195.500	87	16.195.500	87	16.195.500	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - Kecamatan Ulujami	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Tersusunnya Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				11.993.000		9.195.500		9.195.500		9.195.500		9.195.500		
Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	11.993.000	1	9.195.500	1	9.195.500	1	9.195.500	1	9.195.500		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pencapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				5.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	12	12	5.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000		
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Pencapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksanannya Fasilitasi Percapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000		
7.01.02.2.02.0005 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5.993.000		5.195.500		5.195.500		5.195.500		5.195.500		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	5.993.000	1	5.195.500	1	5.195.500	1	5.195.500	1	5.195.500		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				12.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	12	12	12.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				5.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Terlaksanannya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	12	12	5.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000		
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				5.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Terlaksanannya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	12	12	5.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Terlaksanannya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				35.986.000		32.819.600		32.819.600		32.819.600		32.819.600		
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Ulujami)	Persentase Kelembagaan Desa dan Kelurahan yang Aktif (%)	80	83	35.986.000	83	32.819.600	89	32.819.600	89	32.819.600	94	32.819.600	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - Kecamatan Ulujami	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				35.986.000		32.819.600		32.819.600		32.819.600		32.819.600		
Jumlah dokumen Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Masyakart	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	1	1	35.986.000	1	32.819.600	1	32.819.600	1	32.819.600	1	32.819.600		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	3	3		3		3		3		3			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	3	3	3.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000		
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				28.998.000		28.998.000		28.998.000		28.998.000		28.998.000		
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	1	1	28.998.000	1	28.998.000	1	28.998.000	1	28.998.000	1	28.998.000		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2.000.000		1.821.600		1.821.600		1.821.600		1.821.600		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	1	2.000.000	1	1.821.600	1	1.821.600	1	1.821.600	1	1.821.600		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum (Ulujami)	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani (%)	100	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Ulujami	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Jumlah laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Terlaksananya Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				62.758.000		47.142.800		47.142.800		47.142.800		47.142.800		
Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama (Ulujami)	Persentase Konflik di Masyarakat yang Ditangani (%)	100	100	62.758.000	100	47.142.800	100	47.142.800	100	47.142.800	100	47.142.800	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - Kecamatan Ulujami	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				62.758.000		47.142.800		47.142.800		47.142.800		47.142.800		
Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	1	1	62.758.000	1	47.142.800	1	47.142.800	1	47.142.800	1	47.142.800		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	350	350		350		350		350		350			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	36	36		36		36		36		36			
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				47.158.000		31.542.800		31.542.800		31.542.800		31.542.800		
Terlaksanannya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	350	350	47.158.000	350	31.542.800	350	31.542.800	350	31.542.800	350	31.542.800		
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Terlaksanannya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	36	36	1.000.000	36	1.000.000	36	1.000.000	36	1.000.000	36	1.000.000		
7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Terlaksanannya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
7.01.05.2.01.0006 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				13.600.000		13.600.000		13.600.000		13.600.000		13.600.000		
Terlaksanannya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	4	13.600.000	4	13.600.000	4	13.600.000	4	13.600.000	4	13.600.000		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				81.000.000		19.940.000		19.940.000		19.940.000		19.940.000		
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa (Ulujami)	Jumlah Desa yang Naik Statusnya (Desa)	72,22	83,33	81.000.000	83,33	19.940.000	88,88	19.940.000	88,88	19.940.000	94,44	19.940.000	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Ulujami	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				81.000.000		19.940.000		19.940.000		19.940.000		19.940.000		
Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	18	18	81.000.000	18	19.940.000	18	19.940.000	18	19.940.000	18	19.940.000		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	18	18		18		18		18		18			
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	18	18		18		18		18		18			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	18		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	18	18		18		18		18		18			
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Terfasilitasinya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	18	18	1.000.000	18	1.000.000	18	1.000.000	18	1.000.000	18	1.000.000		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Terfasilitasinya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	18	18	3.000.000	18	3.000.000	18	3.000.000	18	3.000.000	18	3.000.000		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Terfasilitasinya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	18	18	3.000.000	18	3.000.000	18	3.000.000	18	3.000.000	18	3.000.000		
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				3.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksanaya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	18	18	3.000.000	18	2.000.000	18	2.000.000	18	2.000.000	18	2.000.000		
7.01.06.2.01.3006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				50.000.000		0		0		0		0		
Terlaksanaya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	18	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.06.2.01.3007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				3.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Terlaksanaya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1	1	3.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		
7.01.06.2.01.3008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				5.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	10	10	5.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000		
7.01.06.2.01.3009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				3.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Terlaksanaya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	1	3.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		
7.01.06.2.01.3010 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif				5.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Terlaksanaya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	1	1	5.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		
7.01.06.2.01.3016 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				5.000.000		1.940.000		1.940.000		1.940.000		1.940.000		
Terlaksanaya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	1	1	5.000.000	1	1.940.000	1	1.940.000	1	1.940.000	1	1.940.000		

https://jdih.pemalangkab.go.id

Adapun Daftar Sub kegiatan Program Prioritas dalam Mendukung Pembangunan Daerah untuk Kecamatan Ulujami selama tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada Tabel 4.3 . sebagai berikut :

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas penyeelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Sub Kegiattan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan b. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan - Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

			- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan c. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		

https://jdih.pemalangkab.go.id

			b. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
3.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	b. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan b. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

			dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Kegiatan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia - Sub Kegiatan Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan dan Nasional - Sub Kegiatan Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

			- Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa - Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi	

https://jdih.pemalangkab.go.id

			Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Pencanaan Pembangunan Partisipatif - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	

https://jdih.pemalangkab.go.id

C. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable)* mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada

https://jdih.pemalangkab.go.id

saat menyusun laporan pertanggung jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Kecamatan Ulujami yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Ulujami yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2030 Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ulujami

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Ulujami									
2.	Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan	%	22,22	33,33	44,44	55,55	66,66	77,77	88,88	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	88,84	88,85	88,86	88,87	88,88	88,89	88,9	
4.	Nilai SAKIP OPD	Angka	60,04	60,05	60,1	60,15	60,25	60,35	60,5	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Adapun Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2030 Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Ulujami

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	7.01 - KECAMATAN										
2.	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Kelembagaan Desa dan Kelurahan yang Aktif	positif	%	80	80	83	85	89	89	94	
4.	Persentase Konflik di Masyarakat yang Ditangani	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Pelimpahan Kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakanÂ setiapÂ tahun	positif	%	87	87	87	87	87	87	87	
6.	Persentase peningkatan status desa mandiri	positif	%	72,22	77,77	83,33	83,33	88,88	88,88	94,44	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPUAN PENTING SUBTANSIAL

Rencana Strategis ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang / urusan Penunjang Pemerintahan Daerah untuk periode tahun 2025 - 2029. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang / urusan Penunjang Pemerintahan Daerah dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pemalang yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029. Sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L dan Renstra Pemerintah Provinsi untuk tercapainya sasaran pembangunan di Kabupaten Pemalang.

5.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Kecamatan Ulujami ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Ulujami. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman bersama dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Ulujami Tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 dan menjadi Pedoman Penyueunan Rencna Kerja Kecamatan Ulujami tahun 2030 sebagai tahun trasnsisi serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Pemalang. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Ulujami merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan atau target kinerja sasaran Kecamatan Ulujami.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Kecamatan Ulujami yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Ulujami harus ditingkatkan.

5.3. PELAKSANAAN PENGENDALIN EVALUASI

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKJIP) Kecamatan Ulujami. Laporan Kinerja (LKJIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Kecamatan Ulujami di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Ulujami ini.

Pemalang, 19 September 2025
CAMAT ULUJAMI

MUHIBIN, A.Md.,SH.
Pembina
NIP. 19710112 199603 1 004

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pemerintah daerah diberikan kesempatan yang luas dalam merencanakan pembangunan di daerah sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan ini diberikan dalam rangka mengakomodir kebutuhan, karakteristik dan ciri khas yang bersifat kedaerahan untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal demi terwujudnya pembangunan yang mampu memberikan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menjalankan tugasnya, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut.

Pada Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sedangkan pada Pasal 272 menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada RPJMD.

Kecamatan Bantarbolang sebagai salah satu Perangkat Daerah harus menyusun Renstra Tahun 2025-2029 dikarenakan adanya pemilihan Bupati dan Wakil yang baru. Penyusunan Renstra Kecamatan Bantarbolang sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kecamatan Bantarbolang berpedoman pada Inmendagri No.2 Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Bantarbolang serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Renstra menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Bantarbolang selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dan merupakan tolak ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan pelayanan publik yang baik dan mewujudkan masyarakat desa/kelurahan yang berdaya.

Dokumen Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang. Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut :

Gambar 1.2
Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

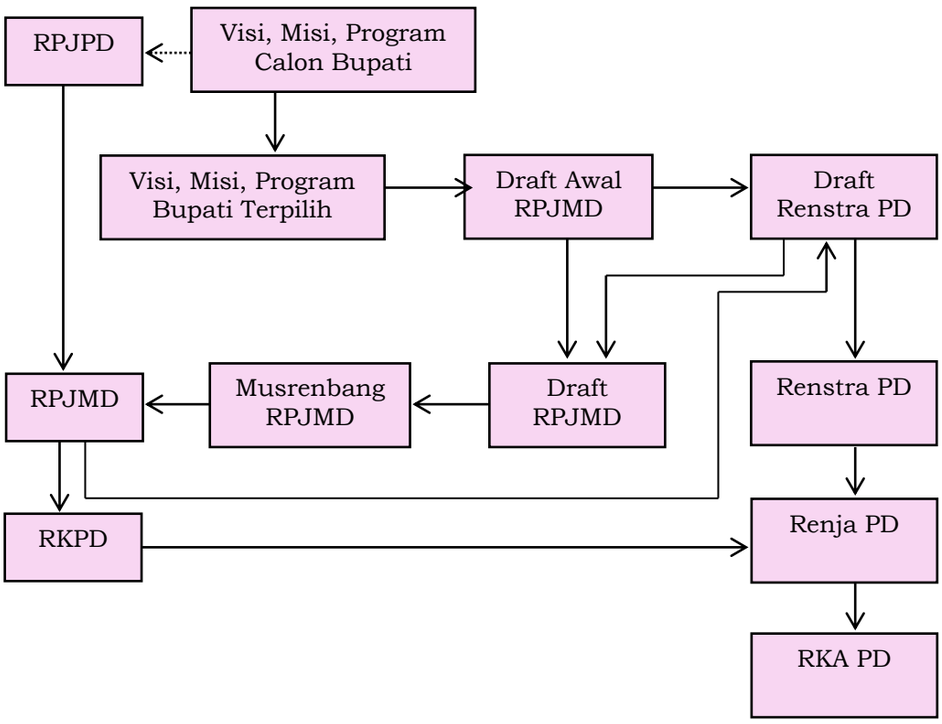

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

https://jdih.pemalangkab.go.id

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

https://jdih.pemalangkab.go.id

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20217 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ...);

https://jdih.pemalangkab.go.id

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021- 2050 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang; (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029;
27. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 adalah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah melalui peningkatan pelayanan kecamatan yang prima.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bantarbolang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah di Unsur Kewilayahan;
2. Menjadi ajuan kerja resmi bagi Kecamatan Bantarbolang serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Unsur Kewilayahan;
3. Sebagai pedoman pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi capaian kinerja pembangunan Kebudayaan periode tahun 2025-2029.

https://jdih.pemalangkab.go.id

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Bantarbolang, berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Bantarbolang, sumber daya Kecamatan Bantarbolang, kinerja penyelenggaraan pelayanan pada Kecamatan Bantarbolang, permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Bantarbolang, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra PD provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan penentuan isu-isu strategis.
3. Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bantarbolang.
4. Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
5. Bab V Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Bantarbolang.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BANTARBOLANG

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Bantarbolang

2.1.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Bantarbolang

Kecamatan Bantarbolang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Bantarbolang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Bantarbolang

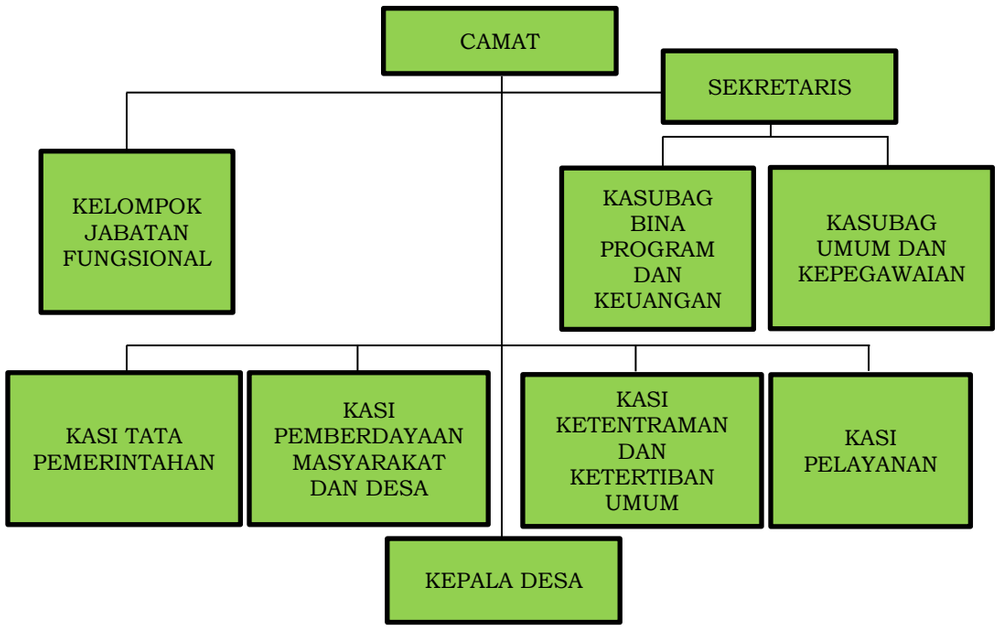

Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

A. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Camat mempunyai uraian tugas :

1. Mengarahkan penyusunan dokumen perencanaan kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan organisasi, perencanaan partisipatif dan perencanaan yang lebih tinggi dan ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Merumuskan kebijakan kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Merumuskan inovasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
4. Mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan kecamatan, meliputi kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan umum dan kesekretariatan sesuai dengan tugas fungsi dan pedoman pelaksanaan agar tepat sasaran dan tujuan;
5. Mengarahkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan dengan melalui bimbingan, supervisi, fasilitasi dan evaluasi guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan;
6. Mengarahkan penyediaan dan pelayaan informasi publik serta penyusunan data dan informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
7. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsinya guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh PD kabupaten yang ada di kecamatan sesuai dengan petunjuk pimpinan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
9. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan Peraturan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;

https://jdih.pemalangkab.go.id

10. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Merumuskan laporan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kerja organisasi.

B. Sekretaris Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan kesekretariatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian sesuai dengan kebituhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
5. Mengoordinasikan penyusunan kondep inovasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
9. Melaksanakan tugas dan kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

https://jdih.pemalangkab.go.id

a. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Menyusun konsep dokumen perencanaan Kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan oprganisasi, perencanaan partisipatif, dan perencanaanyang lebih tinggi guna dirumuskan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep laporan capaian kinerja Kecamatan yang meliputi LkjIP, laporan pelaksanaan APBD dan laporan kinerja lain berdasarkan Renja dan realisasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban;
5. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib adminstrasi;
6. Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan keuangan;
7. Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi LRA, LO, LPE, neraca dan CaLK serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;
8. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
10. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kecamata sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepasa pimpinan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

https://jdih.pemalangkab.go.id

b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai sengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengelola kegiatan administrasi surat menyurat, kepegawaian, penataan arsip, dokumentas, dan kearsipan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
4. Mengelola kegiatan kerumahtanggaan meliputi penyediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, pelayanan tamu dinas dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Mengelola administrasi barang milik daerah yang meliputi penyusunan analisa kebutuhan dan pemeliharaan barang, penatausahaan barang, dan penyusunan administrasi barang lainnya sesuai dengan peraturan pengelolaan barang milik daerah guna tertib administrasi;
6. Mengelola kegiatan ketatalaksanaan meliputi penyusunan standart dan prosedur kerja sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Mengelola kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi penyediaan dan pelayanan informasi publik, penyusunan data informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian, pengaturan tata tempat dan tata acara serta kegiatan kehumasan dan keprotokolan lain sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

https://jdih.pemalangkab.go.id

c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta, dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan memeriksa berkas yang diajukan kepala desa sebagai bahan konsultasi kepada pimpinan guna disahkan oleh pimpinan;
5. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan melalui fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, fasilitasi pemberian tunjangan perangkat desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;
6. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Seksi Tata Pemerintahan meliputi data monografi desa, data perangkat desa dan data terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
8. Menyusun konsep motivasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, keagamaan, pembinaan kesehatan, keluarga berencana, organisasi perempuan, pendidikan, pemuda dan olahraga dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan sosial desa melalui fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pembangunan desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjaama desa dengan pihak ketiga, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, koordinasi pendampingan desa, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial guna tertib administrasi dan kelancaran dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dengan melibatkan stakeholder terkait demi tercapainya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran;
6. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;

https://jdih.pemalangkab.go.id

9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan dan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawabkan kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan meliputi fasilitasi pengaduan masyarakat, kejadian musibag, bencana umum atau kejadian luar biasa lainnya serta upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lainnya dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan pemuka agama/tokoh masyarakat serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau desa/kelurahan serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna tegaknya peraturan;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah yang ada di wilayah kecamatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dan/atau swasta dan/atau pihak terkait lainnya sesuai dengan prosesur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keamanan dan terpeliharanya prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah;
6. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan yang bergerak di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
7. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;

https://jdih.pemalangkab.go.id

8. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kebutuhan informasi publik;
9. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

f. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan kegiatan koordinasi terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan dan kabupaten, pemerintah desa/kelurahan, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep rencana operasional dan standar pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
5. Melaksanakan kegiatan fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan di bidang perizinan, non perizinan, administrasi pertanahan dan pelayanan administrasi lainnya sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dan pemeriksaan dokumen/berkas permohonan, cek lokasi apabila disyaratkan, pengesahan hingga penyampaian kembali dokumen/berkas kepada pemohon guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
6. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan prosedur dan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
7. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tercapainya kepuasan masyarakat;
8. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;

https://jdih.pemalangkab.go.id

9. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
10. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Bantarbolang

Sumber daya Kecamatan Bantarbolang sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

a. Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Jumlah pegawai di Kecamatan Bantarbolang dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyakatan sosial tersaji dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.
Pegawai ASN Kecamatan Bantarbolang

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Golongan				Jumlah
				I	II	III	IV	
1	Camat	1	-	-	-		1	1
2	Sekcam	1	-	-	-	1	-	1
3	Kasubag	2	-	-	-	2	-	2
4	Kasi Kecamatan	4	-	-	-	3	1	4
5	JFU Kecamatan	5	4	-	2	7	-	9
6	JFT Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		13	4	-	2	13	2	17

Sumber : Sekretariat Kecamatan Bantarbolang, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.2.
Pegawai Non ASN Kecamatan Bantarbolang

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tenaga Administrasi	5	5	10
2	Tenaga Keamanan	2	-	2
3	Pengemudi	1	-	1
4	Tenaga Kebersihan	2	-	2
Jumlah		10	5	15

Sumber : Sekretariat Kecamatan Bantarbolang, 2025

Pegawai Kecamatan Bantarbolang seluruhnya berjumlah 32 orang, meliputi 23 orang laki-laki dan 9 orang perempuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Bantarbolang dominan laki-laki yaitu sebanyak 71,88%. Agar Kecamatan Bantarbolang menerapkan responsif gender, untuk perekrutan Pegawai ASN selanjutnya disarankan berjenis kelamin perempuan.

Selanjutnya jumlah Pegawai PNS berdasar golongan, meliputi golongan II sebanyak 2 orang, golongan III sebanyak 13 orang dan golongan IV sebanyak 2 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Bantarbolang dominan bergolongan III yaitu sebanyak 76,47 %.

Tabel 2.3.
Data Struktural Berdasar Diklat Kepemimpinan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Diklatpim III	-	-	-
2	Diklatpim IV	3	3	-
3	ADUM	-	-	-
4	SEPADA	-	-	-
5	Struktural yang belum diklat	5	5	-
Jumlah		8	8	-

Sumber : Sekretariat Kecamatan Bantarbolang 2025

Jumlah struktural berdasarkan diklat kepemimpinan pada Kecamatan Bantarbolang, yaitu 3 orang sudah mengikuti Diklatpim IV, dan 5 orang belum mengikuti diklat kepemimpinan, hal ini disebabkan masih menunggu penyelenggaraan diklat dari instansi yang berwenang.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.4.
Data Pegawai ASN dan Non ASN Berdasar Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pasca Sarjana (S2)	1	1	-
2	Sarjana (S1)	15	10	5
3	Diploma	2	-	2
4	SLTA	10	8	2
5	SLTP	3	3	-
6	SD	1	1	-
Jumlah		32	23	9

Sumber : Sekretariat Kecamatan Bantarbolang 2025

Jumlah pegawai Kecamatan Bantarbolang berdasar tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S2) sebanyak 1 orang, Sarjana (S1) sebanyak 15 orang, Diploma sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 10 orang dan SD sebanyak 1 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara kualitas SDM di Kecamatan Bantarbolang sudah tercukupi, yaitu dengan prosentase berpendidikan S1 sebanyak 46,88% dan SMA sebanyak 31,25%.

Tabel 2.5.
Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	IIIA	1	1	-
2	IIIB	-	-	-
3	IVA	7	7	-
4	IVB	-	-	-
Jumlah		8	8	-

Sumber : Sekretariat Kecamatan Bantarbolang 2025

Jumlah pegawai Kecamatan Bantarbolang berdasarkan eselon hanya terdapat 2 (du) yaitu Eselon IIIA sebanyak 1 orang dan eselon IVA sebanyak 7 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Kecamatan Bantarbolang berdasarkan tingkat eselon dominan adalah eselon IVA yaitu sebanyak 87,50%.

b. Sarana dan Prasarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Kecamatan Bantarbolang dapat dilihat pada tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.6.
Inventaris Aset Kecamatan Bantarbolang

No	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Jumlah Harga (Rp)
					Baik	Sedang	Rusak	
1	01		Tanah					
		01	Tanah					
			Jumlah KIB A	-	-	-	-	-
2	01		Peralatan dan Mesin					
		02	Alat-alat Besar					
		03	Alat-alat Angkutan/Kendaraan	13	-	13	-	504.514.030
		04	Alat Bengkel dan Alat Ukur					
		05	Alat Pertanian					
		06	Alat Kantor & Rumah Tangga	458	458	-	-	509.367.820
		07	Alat Studio & Alat Komunikasi					
		08	Alat-alat Kedokteran					
		09	Alat Laboratorium					
		10	Alat-alat persenjataan/keamanan					
			Jumlah KIB B	**471**	**458**	**13**	**-**	**1.013.881.850**
3	03		Gedung dan Bangunan					
		11	Bangunan Gedung	11	-	11	-	1.178.458.000
		12	Monumen					
			Jumlah KIB C	**11**	**-**	**11**	**-**	**1.178.458.000**
4	04		Jalan, Irigasi dan Jaringan					
		13	Jalan & Jembatan					
		14	Bangunan Air/Irigasi					
		15	Instalasi					
		16	Jaringan	1	1	-	-	500.000
			Jumlah KIB D	**1**	**1**	**-**	**-**	**500.000**
5	05		Aset Tetap Lainnya					
		17	Buku dan Perpustakaan					
		18	Barang Bercorak Kebudayaan					
		19	Hewan, Ternak dan Tanaman					
			Jumlah KIB E	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6	06		Konstruksi dalam Pengerjaan					
			Jumlah KIB F	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Jumlah Total	**483**	**459**	**24**	**-**	**2.192.839.850**

Sumber : Sekretariat Kecamatan Bantarbolang, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

c. Administrasi Kewilayahan
Terdapat 17 desa di Kecamatan Bantarbolang dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.7.
Administrasi Kewilayahan Kecamatan Bantarbolang

No	Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT	Jumlah Perangkat Desa & Kades	Jumlah Linmas	Ket
1	Banjarsari	2	2	12	8	20	
2	Bantarbolang	6	6	48	15	25	
3	Glandang	2	2	12	8	10	
4	Karanganyar	5	5	14	12	10	
5	Kebon Gede	6	6	24	11	6	
6	Kuta	6	6	24	12	10	
7	Lenggerong	1	1	5	9	17	
8	Pabuaran	2	2	6	10	10	
9	Peguyangan	7	7	20	11	55	
10	Pedagung	6	6	22	12	35	
11	Pegiringan	5	5	49	14	20	
12	Purana	5	5	17	11	25	
13	Sambeng	3	13	3	9	17	
14	Sarwodadi	1	1	5	9	11	
15	Sumurkidang	7	7	20	13	10	
16	Suru	3	3	20	14	6	
17	Wanarata	12	12	53	17	59	
Jumlah		79	362	79	183	346	

Sumber : Sekretariat Kecamatan Bantarbolang, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.1.3.Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarbolang

Gambaran kinerja pelayanan Kecamatan Bantarbolang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan Tabel 2.9 berikut :

Tabel 2.8.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Cakupan layanan masyarakat	%	96,47	0	0	94.49	94,69	96,07	0	0	81,12	83,20	96,07	0	0	85,85	87,86	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kecamatan	indeks	99,73	78	78,00	80	82	84	77,79	78	80,63	82,94	82,50	99,73	100	100,78	101,15	136,82
3	SAKIP	nilai	-	47	44,89	46,89	48,89	60,30	42,89	47,00	52,45	54,35	60,40	91,26	104,70	111,86	111,17	100,17
4	Prosentase penyerapan Anggraan	%	-	96	100	96	0	0	98,40	100	97,92	0	0	102,50	100	102	0	0
4	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	indeks	-	0	9,72	11,72	12,72	13,72	0	9,72	11,72	0	0	0	100	100	0	0
5	Prosentase Kelengkapan administrasi desa binaan	%	-	84	84,00	0	0	0	100	84,00	0	0	0	119,05	100	0	0	0
6	Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan publik	%	-	83	83,00	0	0	0	83,17	83,00	0	0	0	100,25	100	0	0	0
7	Prosentase penanganan pengaduan masyarakat	%	-	83	83,00	0	0	0	100	83,00	0	0	0	120,48	100	0	0	0
8	Persentase pelayanan publik yang tersedia	%	-	0	0	92,22	92,22	92,22	0	0	87,50	100	92,22	0	0	94,88	108,43	100
9	Persentase Masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%	-	0	0	92,00	100	94,00	0	0	75,00	150	94,00	0	0	81,52	150	100
10	Persentase gangguan trantibum Tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%	-	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
11	Persentase potensi konflik Tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	-	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
12	Persentase desa bertata Kelola pemerintahan baik	%	-	0	0	88,24	88,24	94,12	0	0	71,76	100	94,12	0	0	81,32	113,33	100

Sumber : Kecamatan Bantarbolang, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

Semua pelayanan kinerja yang dilakukan oleh Kecamatan Bantarbolang hampir dapat mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini didukung adanya komitmen oleh semua pihak dan ketersediaan sarana dan prasarana yang mencukupi.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.9.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 Sesuai Bab II Rancangan Awal RPJMD tahun 2025 – 2029

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	%	100	100	100	100	100
2	Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	%	76,67	76,67	74,00	100	100
3	Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan	%	90	100	100	100	100
4	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi	%	16,67	16,67	16,67	16,67	94
5	Persentase jalan kewenangan kelurahan kondisi baik	%	NA	NA	NA	NA	NA
6	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	%	100	100	100	100	100
7	Jumlah potensi konflik	kasus	0	0	4	0	0
8	Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik	%	88,24	99,64	81,32	88,24	94,12

Sumber : Kecamatan Bantarbolang, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.10.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang

No	Indikator Kinerja	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	537.343.000	0	0	0	0	520.687.000	0	0	0	0	96,90	0	0	0	0	0	0
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	212.256.000	0	0	0	0	212.256.000	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
4	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran	30.320.000	0	0	0	0	30.320.000	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
5	Program pengembangan kewilayahan	25.100.000	0	0	0	0	25.100.000	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
6	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	0	780.619.000	2.867.772.719	2.460.636.770	2.935.760.608	0	777.947.800	2.625.283.963	2.408.020.855	2.808.891.442	0	99,65	92,00	97,86	95,68	69,00	65,27
7	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	0	41.390.000	24.359.000	2.047.500	2.207.332	0	40.940.000	25.309.000	2.047.500	2.206.000	0	98,91	104,00	100	99,94	-23,67	-24,88

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Indikator Kinerja	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
8	Program pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	0	69.180.000	13.565.100	15.955.000	29.103.000	0	60.480.000	15.546.600	15.955.000	29.103.000	0	87,42	114,61	100	100	-14,49	-12,97
9	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	0	15.520.000	5.780.000	1.630.000	16.000.000	0	15.520.000	5.780.000	1.630.000	16.000.000	0	100	100	100	100	0,78	0,78
10	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	0	72.116.000	39.531.181	39.437.000	66.150.000	0	68.966.000	37.081.181	38.992.000	66.150.000	0	95,63	94,00	98,87	100	-2,07	-1,02
11	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	0	83.175.000	9.990.000	2.760.980	5.000.000	0	82.875.000	4.000.000	2.760.980	2.850.000	0	99,64	40,04	100	57,00	-23,50	-24,14

Sumber : Kecamatan Bantarbolang, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang, maka dalam melaksanakan tugas Kecamatan Bantarbolang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian jenis pelayanan dan kelompok sasaran layanan Kecamatan Bantarbolang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Bantarbolang

No	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1	Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya	Perangkat Daerah
2	Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya	Desa
3	Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya	Perangkat Daerah
4	Pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya	Perangkat Daerah
5	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya	Desa

Sumber : Kecamatan Bantarbolang, 2025

2.1.5.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bantarbolang

Kecamatan Bantarbolang dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Bantarbolang tahun 2025-2029, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Bantarbolang adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan;
4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa dan kecamatan;
5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Bantarbolang adalah sebagai berikut:

1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya Perangkat Daerah dan Pendamping Desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa;
3. Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan;
4. Adanya Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa dan kecamatan;
5. Adanya Perangkat Daerah dan Pendamping Desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bantarbolang

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan,Kecamatan Bantarbolang sebagai PD mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Bantarbolang dapat dilihat dalam tabel 2.12 berikut :

Tabel 2.12.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bantarbolang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia	Masih terbatasnya jenis data pemerintahan yang dipublikasi	Masih terbatasnya pemahaman mengenai publikasi data
2	Belum optimalnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Masih rendahnya linmas yang mempunyai kompetensi	Masih terbatasnya Linmas yang mengikuti pelatihan
		Belum optimalnya koordinasi penegakkan Perda/Perbup	Belum optimalnya koordinasi monitoring penegakkan Perda/Perbup
3	Masih terjadi potensi konflik di tingkat desa dan kecamatan	Masih banyak masyarakat yang belum paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Belum optimalnya peringatan hari besar nasional dan hari besar agama sebagai upaya menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
			Belum optimalnya penanganan potensi konflik sosial
			Perlu ditingkatkannya koordinasi antar pimpinan di Kecamatan
4	Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait tata kelola pemerintahan desa	Belum optimalnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan desa	Masih terdapat desa yang berstatus desa berkembang.

Sumber : Kecamatan Bantarbolang, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pengarusutamaan gender diterapkan oleh Kecamatan Bantarbolang pada kegiatan Musrenbang Kecamatan, dimana perwakilan kelompok perempuan menjadi salah satu komponen peserta. Pengarusutamaan gender diterapkan juga dalam fasilitasi lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yaitu fasilitasi kepada PKK dan Posyandu.

Dari hasil data rekapitulasi Indeks Desa (ID) Tahun 2025 yang memuat 6 (enam) aspek penilaian antara lain : aspek layanan dasar, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek lingkungan, aspek aksesbilias dan aspek tata kelola pemerintahan desa dapat disimpulkan bahwa dari seluruh jumlah desa di Kecamatan Bantarbolang yang berjumlah 17 desa terdapat 6 (enam) desa berstatus desa berkembang (35,29%), 7 (tujuh) desa berstatus desa Maju (41,18%) dan 4 (empat) desa berstatus desa Mandiri (23,53%).

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.2.2. Perumusan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan, pada tabel 2.13 dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 2.13.
Isu Strategsi Kecamatan Bantarbolang

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	1. Menurunnya IRB 2. Masih rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan 3. Belum optimalnya penataan desa 4. Belum optimalnya data statistik yang dimiliki 5. Masih kurangnya Tingkat keamanan informasi pemerintahan 6. Kurangnya pelestarian warisan budaya	Belum optimalnya budaya e-government	1. Krisis utang 2. Cyber Security	1. Tata kelola pemerintahan belum optimal 2. Kepastian dan Penegakan hukum masih lemah 3. Demokratisasi belum optimal	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Reformasi tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi

https://jdih.pemalangkab.go.id

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	7. Masih kurangnya Tingkat keamanan informasi pemerintahan 8. Belum optimalnya data statistik yang dimiliki 9. Kurangnya pelestarian warisan budaya dan masih kurangnya SDM yang kompeten 10. Belum optimalnya koordinasi antar bidang 11. Belum optimalnya dukungan untuk 12. Menurunnya IRB 13. Masih rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan 14. Belum optimalnya penataan desa					

https://jdih.pemalangkab.go.id

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	15. Belum optimalnya dukungan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan kurangnya kualitas SDM yang sesuai kompetensinya 16. Belum optimalnya kualitas SDM dan perencanaannya 17. Masih rendahnya PAD pajak daerah yang diterima namun angka belanja daerah tinggi 18. Belum maksimalnya administrasi kepegawaian 19. Masih kurangnya pemandaatan hasil penelitian dan pengembangan 20. Belum optimalnya Penyelenggaraan pengawasan					

https://jdih.pemalangkab.go.id

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	21. Belum optimalnya pelayaan publik dan masih kurangnya SDM yang kompeten 22. Rasio belanja pegawai					

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bantarbolang

Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang pelayanan publik, maka Kecamatan Bantarbolang harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Kecamatan Bantarbolang secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan tingkat desa dan kecamatan, serta masyarakat secara umum.

3.1.1. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Bantarbolang selama tahun 2025–2029 adalah "**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan**". Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bantarbolang sebagai perangkat daerah yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kecamatan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman. Tujuan tersebut diukur dengan indikator jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan.

3.1.2 Sasaran

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Bantarbolang dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Bantarbolang selama tahun 2025-2029, adalah **"Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat"** dengan indikatornya : Nilai SKM dan Prosentase meningkatnya jumlah Desa Mandiri.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bantarbolang dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1. (terlampir).

https://jdih.pemalangkab.go.id

3.2. Strategi

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Strategi yang diambil oleh Kecamatan Bantarbolang guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan publik sesuai SOP
2. Menyediakan sarana dan prasarana untuk menampung usulan/aspirasi masyarakat demi peningkatan kinerja
3. Meningkatkan kondisi yang ketentraman dan ketertiban wilayah
4. Meningkatkan penanganan konflik
5. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
6. Meningkatkan nilai SAKIP

3.3. Penahapan Rencana Strategis

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat dilihat pada tabel 3.2.di bawah ini :

Tabel 3.2
Penahapan Rencana Strategis

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1. Meningkatkan pelayanan publik sesuai SOP dengan berbasis digitalisasi yang mudah dan murah. 2. Meningkatkan nilai SAKIP dengan peningkatan akuntabilitas pembangunan melalui peningkatan kualitas perencanaan, kinerja dan pelaporan	1. Menyediakan sarana dan prasarana untuk menampung usulan/aspirasi masyarakat demi peningkatan kinerja 2. Meningkatkan nilai SAKIP dengan peningkatan komitmen pemerintah dalam menjalankan pembangunan	1. Meningkatkan kondisi yang ketentraman dan ketertiban wilayah 2. Meningkatkan nilai SAKIP dengan penguatan kebijakan dan regulasi	1. Meningkatkan penanganan konflik dengan meningkatkan harmonisasi kehidupan 2. Meningkatkan nilai SAKIP peningkatan kapabilitas APIP	1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan Pemberian fasilitasi penyusunan peraturan, perencanaan, pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset 2. Meningkatkan nilai SAKIP dengan peningkatan kualitas dan profesionalisme pegawai, penguatan manajemen resiko, digitalisasi, serta evaluasi berkelanjutan

https://jdih.pemalangkab.go.id

3.4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategis yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025 – 2029 memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Bantarbolang disajikan pada table 3.3 berikut :

Tabel 3.3.
Arah Kebijakan Kecamatan Bantarbolang

No	Operasionalisasi NPSK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Bantarbolang	Ket
1	Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum	Peningkatan kualitas perencanaan daerah difokuskan pada transparansi, akuntabilitas perencanaan, dan sinergitas dok pusat dan provinsi	Penguatan sistem perencanaan, pelayanan pemerintahan dan pengukuran kinerja	
		Peningkatan pengelolaan kearsipan difokuskan pada peningkatan kearsipan sesuai standar dan digitalisasi arsip	Penguatan sumber daya dalam mengelola kearsipan yang sesuai dengan standar dan digitalisasi arsip	
		Peningkatan kualitas pengawasan difokuskan pada pencapaian maturitas dan kapasitas APIP serta mitigasi risiko	Penyediaan perencanaan yang berkualitas dan pelaksanaan evaluasi kinerja yang efektif dan obyektif	
		Peningkatan kapasitas pegawai dengan fokus pendidikan dan pelatihan	Pengusulan pendidikan dan pelatihan kepada instansi terkait	
		Peningkatan pengawasan bangunan gedung dan lingkungan dengan fokus pendataan secara berkelanjutan dan menyeluruh	Penyediaan perencanaan dalam rehabilitasi gedung, bangunan serta sarana prasarana pendukung kerja	

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Operasionalisasi NPSK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Bantarbolang	Ket
		Peningkatan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui optimalisasi pemanfaatan TPST;	Optimalisasi kegiatan jumat bersih bersama seluruh masyarakat dan pegawai di lingkungan Kecamatan Bantarbolang	
2	Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Pengembangan industri kecil menengah dengan penguatan sentra/kluster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital	Pengembangan pelatihan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan UMKM	
3	Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan konduktivitas wilayah dengan peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama dan pemahaman wawasan kebangsaan	Meningkatkan pelatihan limas dan pembinaan masyarakat terkait dengan sistem pengaduan maupun keamanan dan ketertiban	
4	Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa di fokuskan pada peningkatan kualitas eprocurements, kualitas sarana dan prasarana	Penguatan koordinasi dan supervisi dar	
5	Membina dan Mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan	Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan difokuskan pada peningktan indeks desa, peningkatan peran BUMDes dalam pembangunan daerah, peningkatan pembinaan dan pengawasan kecamatan dalam pembangunan desa/kelurahan dan pengembangan kerjasama antar dan pengembangan kerjasama antar desa	Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/kelurahan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maka Kecamatan Bantarbolang menyusun program, kegiatan, sub kegiatan penyelenggaraan bidang urusan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang yang relevan dengan RPJMD 2025-2029. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dapat tersusun pada tabel 4.1 (terlampir)

4.2. Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Pendanaan

Dalam mendukung visi dan misi Bupati telah disusun program, kegiatan, subkegiatan dan pendanaan Kecamatan Bantarbolang selama tahun 2026 sampai dengan 2030, seperti yang tecantum pada tabel 4.2 (terlampir)

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.3. Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Pada tabel berikut Kecamatan Bantarbolang telah menyusun daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah.

Tabel 4.3.
Daftar Subkegiatan Prioritas Kecamatan Bantarbolang
dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		
			Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
			Subkegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
			Subkegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
			Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		
			Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
			Subkegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
			Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum		
			Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Subkegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum		
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Subkegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			Subkegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
			Subkegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
			Subkegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa		
			Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
			Subkegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
			Subkegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
			Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
			Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan periode Tahun 2025-2029 dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pemalang yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029. Sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian dan Renstra PD Kabupaten Pemalang yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan di Kabupaten Pemalang.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Kecamatan Bantarbolang ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Bantarbolang. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman bersama dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Bantarbolang serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Pemalang. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Bantarbolang merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan dan atau target kinerja sasaran Kecamatan Bantarbolang. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Kecamatan Bantarbolang yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Bantarbolang harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LkjIP) Kecamatan Bantarbolang. Laporan Kinerja (LkjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Kecamatan Bantarbolang di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Bantarbolang ini.

Pemalang,

CAMAT BANTARBOLANG

CAMAT RANDUDONGKAL

SEMIET EDY RIYANTO, SE.MM
Pembina
NIP. 19720710 199403 1 008

Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN TABEL

https://jdih.pemalangkab.go.id

TABEL 3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA

KECAMATAN BANTARBOLANG

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Bantarbolang											
- Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan		Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan (%)	11,76	23,53	35,29	47,06	64,71	82,35	100,00	
		Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Angka)	82,50	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	
			Nilai SAKIP OPD (Angka)	60,40	60,40	62,30	64,20	66,10	68,00	69,90	

https://jdih.pemalangkab.go.id

TABEL 4.1 PROGRAM RENSTRA
KECAMATAN BANTARBOLANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					3.378.449.000,00		3.576.278.759,00		3.576.278.759,00		3.576.278.759,00		3.576.278.759,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.095.124.750,00		3.513.306.299,00		3.513.306.299,00		3.513.306.299,00		3.513.306.299,00	
Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota (Bantarbolang)	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi (%)	100	100	100	3.095.124.750,00	100	3.513.306.299,00	100	3.513.306.299,00	100	3.513.306.299,00	100	3.513.306.299,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					18.120.250,00		595.240,00		595.240,00		595.240,00		595.240,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Bantarbolang)					18.120.250,00		595.240,00		595.240,00		595.240,00		595.240,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					54.589.000,00		28.968.720,00		28.968.720,00		28.968.720,00		28.968.720,00	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Bantarbolang)					54.589.000,00		28.968.720,00		28.968.720,00		28.968.720,00		28.968.720,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					10.000.000,00		8.600.000,00		8.600.000,00		8.600.000,00		8.600.000,00	
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum (Bantarbolang)					10.000.000,00		8.600.000,00		8.600.000,00		8.600.000,00		8.600.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					47.062.500,00		18.777.640,00		18.777.640,00		18.777.640,00		18.777.640,00	
Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama (Bantarbolang)					47.062.500,00		18.777.640,00		18.777.640,00		18.777.640,00		18.777.640,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					153.552.500,00		6.030.860,00		6.030.860,00		6.030.860,00		6.030.860,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa (Bantarbolang)					153.552.500,00		6.030.860,00		6.030.860,00		6.030.860,00		6.030.860,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					3.378.449.000,00		3.576.278.759,00		3.576.278.759,00		3.576.278.759,00		3.576.278.759,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

TABEL 4.2 PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
KECAMATAN BANTARBOLANG

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Bantarbolang							
- Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan				Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan (%)		
		Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Angka)		
					Nilai SAKIP OPD (Angka)		
			Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota (Bantarbolang)		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan K	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

https://jdih.pemalangkab.go.id

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
KECAMATAN BANTARBOLANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01 - KECAMATAN				3.378.449.000,00		3.576.278.759,00		3.576.278.759,00		3.576.278.759,00		3.576.278.759,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.095.124.750,00		3.513.306.299,00		3.513.306.299,00		3.513.306.299,00		3.513.306.299,00		
Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota (Bantarbolang)	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi (%)	100	100	3.095.124.750,00	100	3.513.306.299,00	100	3.513.306.299,00	100	3.513.306.299,00	100	3.513.306.299,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Bantarbolang	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9.096.000,00		17.496.000,00		17.496.000,00		17.496.000,00		17.496.000,00		
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	9.096.000,00	4	17.496.000,00	4	17.496.000,00	4	17.496.000,00	4	17.496.000,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat				1.438.500,00		2.638.500,00		2.638.500,00		2.638.500,00		2.638.500,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	1.438.500,00	3	2.638.500,00	3	2.638.500,00	3	2.638.500,00	3	2.638.500,00		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen				1.206.000,00		2.406.000,00		2.406.000,00		2.406.000,00		2.406.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.206.000,00	1	2.406.000,00	1	2.406.000,00	1	2.406.000,00	1	2.406.000,00		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.406.000,00		2.606.000,00		2.606.000,00		2.606.000,00		2.606.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.406.000,00	1	2.606.000,00	1	2.606.000,00	1	2.606.000,00	1	2.606.000,00		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.406.000,00		2.606.000,00		2.606.000,00		2.606.000,00		2.606.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.406.000,00	1	2.606.000,00	1	2.606.000,00	1	2.606.000,00	1	2.606.000,00		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan				1.406.000,00		2.606.000,00		2.606.000,00		2.606.000,00		2.606.000,00		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.406.000,00	1	2.606.000,00	1	2.606.000,00	1	2.606.000,00	1	2.606.000,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar				1.118.000,00		2.318.000,00		2.318.000,00		2.318.000,00		2.318.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	1.118.000,00	4	2.318.000,00	4	2.318.000,00	4	2.318.000,00	4	2.318.000,00		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.115.500,00		2.315.500,00		2.315.500,00		2.315.500,00		2.315.500,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	1.115.500,00	4	2.315.500,00	4	2.315.500,00	4	2.315.500,00	4	2.315.500,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.401.661.500,00		2.404.891.500,00		2.404.891.500,00		2.404.891.500,00		2.404.891.500,00		
Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	15	17	2.401.661.500,00	17	2.404.891.500,00	17	2.404.891.500,00	17	2.404.891.500,00	17	2.404.891.500,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	11	11		11		11		11		11			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.398.043.000,00		2.398.273.000,00		2.398.273.000,00		2.398.273.000,00		2.398.273.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	15	17	2.398.043.000,00	17	2.398.273.000,00	17	2.398.273.000,00	17	2.398.273.000,00	17	2.398.273.000,00		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.280.000,00		2.280.000,00		2.280.000,00		2.280.000,00		2.280.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1.280.000,00	1	2.280.000,00	1	2.280.000,00	1	2.280.000,00	1	2.280.000,00		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.142.500,00		2.142.500,00		2.142.500,00		2.142.500,00		2.142.500,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	11	11	1.142.500,00	11	2.142.500,00	11	2.142.500,00	11	2.142.500,00	11	2.142.500,00		
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi				1.196.000,00		2.196.000,00		2.196.000,00		2.196.000,00		2.196.000,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	1	1	1.196.000,00	1	2.196.000,00	1	2.196.000,00	1	2.196.000,00	1	2.196.000,00		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2.843.000,00		15.843.000,00		15.843.000,00		15.843.000,00		15.843.000,00		
Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	2.843.000,00	1	15.843.000,00	1	15.843.000,00	1	15.843.000,00	1	15.843.000,00		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah				1.200.000,00		8.200.000,00		8.200.000,00		8.200.000,00		8.200.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	1.200.000,00	1	8.200.000,00	1	8.200.000,00	1	8.200.000,00	1	8.200.000,00		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1.643.000,00		7.643.000,00		7.643.000,00		7.643.000,00		7.643.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	1	1	1.643.000,00	1	7.643.000,00	1	7.643.000,00	1	7.643.000,00	1	7.643.000,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat				3.860.000,00		11.860.000,00		11.860.000,00		11.860.000,00		11.860.000,00		
Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	20	20	3.860.000,00	20	11.860.000,00	20	11.860.000,00	20	11.860.000,00	20	11.860.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	20	0		20		20		20		20			
7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-				1.930.000,00		5.930.000,00		5.930.000,00		5.930.000,00		5.930.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	20	20	1.930.000,00	20	5.930.000,00	20	5.930.000,00	20	5.930.000,00	20	5.930.000,00		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1.930.000,00		5.930.000,00		5.930.000,00		5.930.000,00		5.930.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	20	0	1.930.000,00	20	5.930.000,00	20	5.930.000,00	20	5.930.000,00	20	5.930.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				192.040.250,00		321.040.250,00		321.040.250,00		321.040.250,00		321.040.250,00		
Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	1	1	192.040.250,00	1	321.040.250,00	1	321.040.250,00	1	321.040.250,00	1	321.040.250,00		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	5	5		5		5		5		5			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan				6.048.000,00		8.048.000,00		8.048.000,00		8.048.000,00		8.048.000,00		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1	1	6.048.000,00	1	8.048.000,00	1	8.048.000,00	1	8.048.000,00	1	8.048.000,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan				38.989.750,00		45.989.750,00		45.989.750,00		45.989.750,00		45.989.750,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	38.989.750,00	1	45.989.750,00	1	45.989.750,00	1	45.989.750,00	1	45.989.750,00		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.867.500,00		12.867.500,00		12.867.500,00		12.867.500,00		12.867.500,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	1	1	6.867.500,00	1	12.867.500,00	1	12.867.500,00	1	12.867.500,00	1	12.867.500,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				27.795.000,00		35.795.000,00		35.795.000,00		35.795.000,00		35.795.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	5	5	27.795.000,00	5	35.795.000,00	5	35.795.000,00	5	35.795.000,00	5	35.795.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan				9.500.000,00		15.500.000,00		15.500.000,00		15.500.000,00		15.500.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	1	1	9.500.000,00	1	15.500.000,00	1	15.500.000,00	1	15.500.000,00	1	15.500.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi				102.840.000,00		202.840.000,00		202.840.000,00		202.840.000,00		202.840.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	2	2	102.840.000,00	2	202.840.000,00	2	202.840.000,00	2	202.840.000,00	2	202.840.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				29.180.000,00		34.180.000,00		34.180.000,00		34.180.000,00		34.180.000,00		
Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	2	10	29.180.000,00	10	34.180.000,00	10	34.180.000,00	10	34.180.000,00	10	34.180.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	71	10		10		10		10		10			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan				5.600.000,00		10.600.000,00		10.600.000,00		10.600.000,00		10.600.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	71	10	5.600.000,00	10	10.600.000,00	10	10.600.000,00	10	10.600.000,00	10	10.600.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				23.580.000,00		23.580.000,00		23.580.000,00		23.580.000,00		23.580.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	2	10	23.580.000,00	10	23.580.000,00	10	23.580.000,00	10	23.580.000,00	10	23.580.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				244.406.000,00		353.950.000,00		353.950.000,00		353.950.000,00		353.950.000,00		
Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12	12	244.406.000,00	12	353.950.000,00	12	353.950.000,00	12	353.950.000,00	12	353.950.000,00		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				14.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	14.000.000,00	12	18.000.000,00	12	18.000.000,00	12	18.000.000,00	12	18.000.000,00		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				25.500.000,00		26.500.000,00		26.500.000,00		26.500.000,00		26.500.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12	12	25.500.000,00	12	26.500.000,00	12	26.500.000,00	12	26.500.000,00	12	26.500.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				204.906.000,00		309.450.000,00		309.450.000,00		309.450.000,00		309.450.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	204.906.000,00	12	309.450.000,00	12	309.450.000,00	12	309.450.000,00	12	309.450.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				212.038.000,00		354.045.549,00		354.045.549,00		354.045.549,00		354.045.549,00		
Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1	1	212.038.000,00	1	354.045.549,00	1	354.045.549,00	1	354.045.549,00	1	354.045.549,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	26	26		26		26		26		26			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	90	90		90		90		90		90			
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				122.600.000,00		222.600.000,00		222.600.000,00		222.600.000,00		222.600.000,00		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	10	10	122.600.000,00	10	222.600.000,00	10	222.600.000,00	10	222.600.000,00	10	222.600.000,00		
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				5.100.000,00		10.100.000,00		10.100.000,00		10.100.000,00		10.100.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	90	90	5.100.000,00	90	10.100.000,00	90	10.100.000,00	90	10.100.000,00	90	10.100.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan				11.010.000,00		20.010.000,00		20.010.000,00		20.010.000,00		20.010.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	26	26	11.010.000,00	26	20.010.000,00	26	20.010.000,00	26	20.010.000,00	26	20.010.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan				60.720.000,00		80.727.549,00		80.727.549,00		80.727.549,00		80.727.549,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	6	6	60.720.000,00	6	80.727.549,00	6	80.727.549,00	6	80.727.549,00	6	80.727.549,00		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.408.000,00		10.408.000,00		10.408.000,00		10.408.000,00		10.408.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	3	3	8.408.000,00	3	10.408.000,00	3	10.408.000,00	3	10.408.000,00	3	10.408.000,00		
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor				4.200.000,00		10.200.000,00		10.200.000,00		10.200.000,00		10.200.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1	1	4.200.000,00	1	10.200.000,00	1	10.200.000,00	1	10.200.000,00	1	10.200.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				18.120.250,00		595.240,00		595.240,00		595.240,00		595.240,00		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				18.120.250,00		595.240,00		595.240,00		595.240,00		595.240,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat				4.200.000,00		85.440,00		85.440,00		85.440,00		85.440,00		
Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	1	4.200.000,00	1	85.440,00	1	85.440,00	1	85.440,00	1	85.440,00		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di				4.200.000,00		85.440,00		85.440,00		85.440,00		85.440,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan	1	1	4.200.000,00	1	85.440,00	1	85.440,00	1	85.440,00	1	85.440,00		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				12.600.000,00		256.320,00		256.320,00		256.320,00		256.320,00		
Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	1	1	12.600.000,00	1	256.320,00	1	256.320,00	1	256.320,00	1	256.320,00		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di	1	1		1		1		1		1			
7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat				4.200.000,00		85.440,00		85.440,00		85.440,00		85.440,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di	1	1	4.200.000,00	1	85.440,00	1	85.440,00	1	85.440,00	1	85.440,00		
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				4.200.000,00		85.440,00		85.440,00		85.440,00		85.440,00		
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di	2	2	4.200.000,00	2	85.440,00	2	85.440,00	2	85.440,00	2	85.440,00		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah				4.200.000,00		85.440,00		85.440,00		85.440,00		85.440,00		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	1	1	4.200.000,00	1	85.440,00	1	85.440,00	1	85.440,00	1	85.440,00		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				1.320.250,00		253.480,00		253.480,00		253.480,00		253.480,00		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang menunjang pelaksanaan tugas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	17	17	1.320.250,00	17	253.480,00	17	253.480,00	17	253.480,00	17	253.480,00		
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait				1.320.250,00		253.480,00		253.480,00		253.480,00		253.480,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada	17	17	1.320.250,00	17	253.480,00	17	253.480,00	17	253.480,00	17	253.480,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN				54.589.000,00		28.968.720,00		28.968.720,00		28.968.720,00		28.968.720,00		
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				54.589.000,00		28.968.720,00		28.968.720,00		28.968.720,00		28.968.720,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				27.168.720,00		27.168.720,00		27.168.720,00		27.168.720,00		27.168.720,00		
Jumlah laporan/dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh	1	1	27.168.720,00	1	27.168.720,00	1	27.168.720,00	1	27.168.720,00	1	27.168.720,00		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	1		1		1		1		1			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan				200.880,00		200.880,00		200.880,00		200.880,00		200.880,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	1	200.880,00	1	200.880,00	1	200.880,00	1	200.880,00	1	200.880,00		
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di				24.417.840,00		24.417.840,00		24.417.840,00		24.417.840,00		24.417.840,00		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh	1	1	24.417.840,00	1	24.417.840,00	1	24.417.840,00	1	24.417.840,00	1	24.417.840,00		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan				2.550.000,00		2.550.000,00		2.550.000,00		2.550.000,00		2.550.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	1	1	2.550.000,00	1	2.550.000,00	1	2.550.000,00	1	2.550.000,00	1	2.550.000,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				27.420.280,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		
Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga	1	1	27.420.280,00	1	1.800.000,00	1	1.800.000,00	1	1.800.000,00	1	1.800.000,00		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas				27.420.280,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga	1	1	27.420.280,00	1	1.800.000,00	1	1.800.000,00	1	1.800.000,00	1	1.800.000,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				10.000.000,00		8.600.000,00		8.600.000,00		8.600.000,00		8.600.000,00		
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum				10.000.000,00		8.600.000,00		8.600.000,00		8.600.000,00		8.600.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 -	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban				5.000.000,00		6.050.000,00		6.050.000,00		6.050.000,00		6.050.000,00		
Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	4	4	5.000.000,00	4	6.050.000,00	4	6.050.000,00	4	6.050.000,00	4	6.050.000,00		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5.000.000,00		6.050.000,00		6.050.000,00		6.050.000,00		6.050.000,00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	4	4	5.000.000,00	4	6.050.000,00	4	6.050.000,00	4	6.050.000,00	4	6.050.000,00		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan				5.000.000,00		2.550.000,00		2.550.000,00		2.550.000,00		2.550.000,00		
Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tersusun	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian	1	1	5.000.000,00	1	2.550.000,00	1	2.550.000,00	1	2.550.000,00	1	2.550.000,00		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau				5.000.000,00		2.550.000,00		2.550.000,00		2.550.000,00		2.550.000,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian	1	1	5.000.000,00	1	2.550.000,00	1	2.550.000,00	1	2.550.000,00	1	2.550.000,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN				47.062.500,00		18.777.640,00		18.777.640,00		18.777.640,00		18.777.640,00		
Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama				47.062.500,00		18.777.640,00		18.777.640,00		18.777.640,00		18.777.640,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala				47.062.500,00		18.777.640,00		18.777.640,00		18.777.640,00		18.777.640,00		
Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4	4	47.062.500,00	4	18.777.640,00	4	18.777.640,00	4	18.777.640,00	4	18.777.640,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	1.200	591		591		591		591		591			

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3	3		3		3		3		3			
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan				39.262.500,00		14.625.000,00		14.625.000,00		14.625.000,00		14.625.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	1.200	591	39.262.500,00	591	14.625.000,00	591	14.625.000,00	591	14.625.000,00	591	14.625.000,00		
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				2.650.000,00		2.555.440,00		2.555.440,00		2.555.440,00		2.555.440,00		
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan	50	50	2.650.000,00	50	2.555.440,00	50	2.555.440,00	50	2.555.440,00	50	2.555.440,00		
7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				2.700.000,00		170.880,00		170.880,00		170.880,00		170.880,00		
Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4	4	2.700.000,00	4	170.880,00	4	170.880,00	4	170.880,00	4	170.880,00		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di				2.450.000,00		1.426.320,00		1.426.320,00		1.426.320,00		1.426.320,00		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3	3	2.450.000,00	3	1.426.320,00	3	1.426.320,00	3	1.426.320,00	3	1.426.320,00		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				153.552.500,00		6.030.860,00		6.030.860,00		6.030.860,00		6.030.860,00		
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa (Bantarbolang)				153.552.500,00		6.030.860,00		6.030.860,00		6.030.860,00		6.030.860,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi				153.552.500,00		6.030.860,00		6.030.860,00		6.030.860,00		6.030.860,00		
Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	17	17	153.552.500,00	17	6.030.860,00	17	6.030.860,00	17	6.030.860,00	17	6.030.860,00		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata	17	17		17		17		17		17			
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	17	17		17		17		17		17			
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan	17	17		17		17		17		17			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan	17	17		17		187		17		17			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan	0	10		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan	17	17		17		17		17		17			

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan	17	17		17		17		17		17			
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				3.965.000,00		110.880,00		110.880,00		110.880,00		110.880,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan	17	17	3.965.000,00	17	110.880,00	17	110.880,00	17	110.880,00	17	110.880,00		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan				3.965.000,00		140.880,00		140.880,00		140.880,00		140.880,00		
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata	17	17	3.965.000,00	17	140.880,00	17	140.880,00	17	140.880,00	17	140.880,00		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				3.965.000,00		140.880,00		140.880,00		140.880,00		140.880,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	17	17	3.965.000,00	17	140.880,00	17	140.880,00	17	140.880,00	17	140.880,00		
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				3.965.000,00		200.880,00		200.880,00		200.880,00		200.880,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan	17	17	3.965.000,00	17	200.880,00	187	200.880,00	17	200.880,00	17	200.880,00		
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala				122.932.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan	0	10	122.932.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				3.065.000,00		111.200,00		111.200,00		111.200,00		111.200,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan	17	17	3.065.000,00	17	111.200,00	17	111.200,00	17	111.200,00	17	111.200,00		
7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat				2.765.000,00		115.440,00		115.440,00		115.440,00		115.440,00		
Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian	10	10	2.765.000,00	10	115.440,00	10	115.440,00	10	115.440,00	10	115.440,00		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2.765.000,00		111.300,00		111.300,00		111.300,00		111.300,00		
Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	17	17	2.765.000,00	17	111.300,00	17	111.300,00	17	111.300,00	17	111.300,00		
7.01.06.2.01.0013 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif				2.165.000,00		111.080,00		111.080,00		111.080,00		111.080,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan	17	17	2.165.000,00	17	111.080,00	17	111.080,00	17	111.080,00	17	111.080,00		
7.01.06.2.01.0016 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				4.000.000,00		4.988.320,00		4.988.320,00		4.988.320,00		4.988.320,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan	1	1	4.000.000,00	1	4.988.320,00	1	4.988.320,00	1	4.988.320,00	1	4.988.320,00		

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

Kecamatan Randudongkal sebagai salah satu Perangkat Daerah harus menyusun Renstra Tahun 2025-2029 dikarenakan adanya pemilihan Bupati dan Wakil yang baru. Penyusunan Renstra Kecamatan Randudongkal sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kecamatan Randudongkal berpedoman pada Inmendagri No, 2 Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Randudongkal untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Renstra Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Randudongkal serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Renstra menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Randudongkal selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dan merupakan tolak ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan pelayanan publik yang baik dan mewujudkan masyarakat desa/kelurahan yang berdaya.

Dokumen Renstra Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang. Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Gambar 1.2
Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

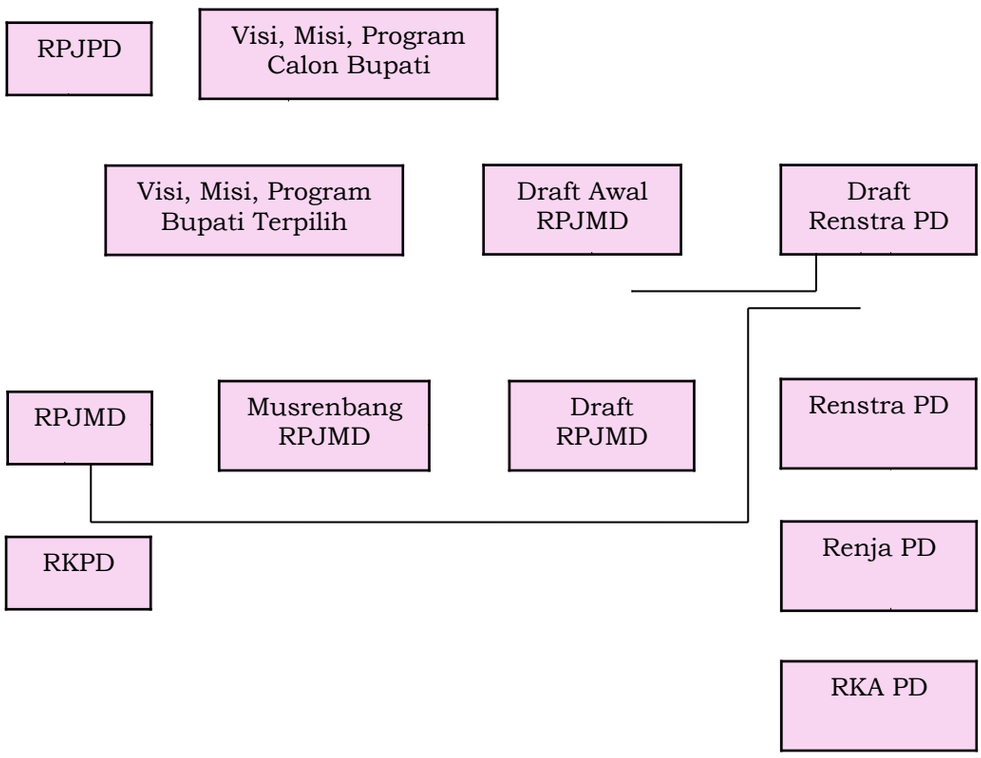

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

https://jdih.pemalangkab.go.id

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 adalah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah melalui peningkatan pelayanan kecamatan yang prima.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Randudongkal untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah di Unsur Kewilayahan;
2. Menjadi ajuan kerja resmi bagi Kecamatan Randudongkal serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Unsur Kewilayahan;
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Kecamatan Randudongkal.

https://jdih.pemalangkab.go.id

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Randudongkal Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Randudongkal, berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Randudongkal, sumber daya Kecamatan Randudongkal, kinerja penyelenggaraan pelayanan pada Kecamatan Randudongkal, permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Randudongkal, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra PD provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan penentuan isu-isu strategis.
3. Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Randudongkal.
4. Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
5. Bab V Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Randudongkal.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN RANDUDONGKAL

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Randudongkal

Kecamatan Randudongkal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Randudongkal mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Randudongkal

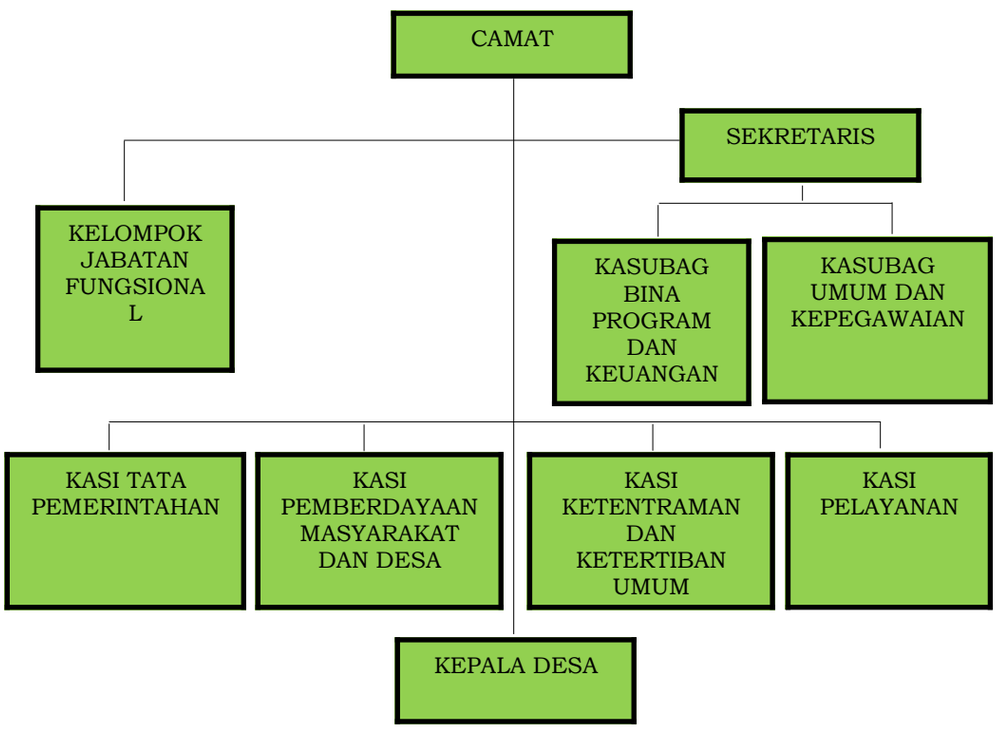

Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta

https://jdih.pemalangkab.go.id

melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

A. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Camat mempunyai uraian tugas :

1. Mengarahkan penyusunan dokumen perencanaan kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan organisasi, perencanaan partisipatif dan perencanaan yang lebih tinggi dan ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Merumuskan kebijakan kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Merumuskan inovasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
4. Mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan kecamatan, meliputi kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan umum dan kesekretariatan sesuai dengan tugas fungsi dan pedoman pelaksanaan agar tepat sasaran dan tujuan;
5. Mengarahkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan dengan melalui bimbingan, supervisi, fasilitasi dan evaluasi guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan;
6. Mengarahkan penyediaan dan pelayaan informasi publik serta penyusunan data dan informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
7. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsinya guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh PD kabupaten yang ada di kecamatan sesuai dengan petunjuk pimpinan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
9. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan Peraturan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
10. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;

https://jdih.pemalangkab.go.id

11. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Merumuskan laporan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kerja organisasi.

B. Sekretaris Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan kesekretariatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian sesuai dengan kebituhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
5. Mengoordinasikan penyusunan kondep inovasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
9. Melaksanakan tugas dan kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

a. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Menyusun konsep dokumen perencanaan Kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan oprganisasi, perencanaan partisipatif, dan perencanaanyang lebih tinggi guna dirumuskan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep laporan capaian kinerja Kecamatan yang meliputi LkjIP, laporan pelaksanaan APBD dan laporan kinerja lain

https://jdih.pemalangkab.go.id

berdasarkan Renja dan realisasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban;
5. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib adminstrasi;
6. Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan keuangan;
7. Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi LRA, LO, LPE, neraca dan CaLK serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;
8. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
10. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kecamata sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepasa pimpinan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai sengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengelola kegiatan administrasi surat menyurat, kepegawaian, penataan arsip, dokumentas, dan kearsipan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
4. Mengelola kegiatan kerumahtanggaan meliputi penyediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, pelayanan tamu dinas dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Mengelola administrasi barang milik daerah yang meliputi penyusunan analisa kebutuhan dan pemeliharaan barang, penatausahaan barang, dan penyusunan administrasi barang lainnya sesuai dengan peraturan pengelolaan barang milik daerah guna tertib administrasi;
6. Mengelola kegiatan ketatalaksanaan meliputi penyusunan standart dan prosedur kerja sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Mengelola kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi penyediaan dan pelayanan informasi publik, penyusunan data informasi

https://jdih.pemalangkab.go.id

Subbagian Umum dan Kepegawaian, pengaturan tata tempat dan tata acara serta kegiatan kehumasan dan keprotokolan lain sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

8. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta, dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan memeriksa berkas yang diajukan kepala desa sebagai bahan konsultasi kepada pimpinan guna disahkan oleh pimpinan;
5. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan melalui fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, fasilitasi pemberian tunjangan perangkat desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;
6. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Seksi Tata Pemerintahan meliputi data monografi desa, data perangkat desa dan data terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
8. Menyusun konsep motivasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;

https://jdih.pemalangkab.go.id

9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, keagamaan, pembinaan kesehatan, keluarga berencana, organisasi perempuan, pendidikan, pemuda dan olahraga dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan sosial desa melalui fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pembangunan desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjaama desa dengan pihak ketiga, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, koordinasi pendampingan desa, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial guna tertib administrasi dan kelancaran dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dengan melibatkan stakeholder terkait demi tercapainya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran;
6. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

https://jdih.pemalangkab.go.id

10. Menyusun laporan dan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawabkan kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan meliputi fasilitasi pengaduan masyarakat, kejadian musibag, bencana umum atau kejadian luar biasa lainnya serta upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lainnya dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan pemuka agama/tokoh masyarakat serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau desa/kelurahan serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna tegaknya peraturan;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah yang ada di wilayah kecamatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dan/atau swasta dan/atau pihak terkait lainnya sesuai dengan prosesur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keamanan dan terpeliharanya prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah;
6. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan yang bergerak di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
7. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kebutuhan informasi publik;

9. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;

https://jdih.pemalangkab.go.id

10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

f. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan kegiatan koordinasi terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan dan kabupaten, pemerintah desa/kelurahan, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep rencana operasional dan standar pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
5. Melaksanakan kegiatan fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan di bidang perizinan, non perizinan, administrasi pertanahan dan pelayanan administrasi lainnya sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dan pemeriksaan dokumen/berkas permohonan, cek lokasi apabila disyaratkan, pengesahan hingga penyampaian kembali dokumen/berkas kepada pemohon guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
6. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan prosedur dan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
7. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tercapainya kepuasan masyarakat;
8. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undanganguna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
9. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
10. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.2. Sumber Daya Kecamatan Randudongkal

Sumber daya Kecamatan Randudongkalsangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

a. Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Jumlah pegawai di Kecamatan Randudongkaldalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyakatan sosial tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.
Pegawai ASN Kecamatan Randudongkal

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Golongan				Jumlah
				I	II	III	IV	
1	Camat	1	-	-	-		1	1
2	Sekcam	1	-	-	-	1	-	1
3	Kasubag	2	-	-	-	2	-	2
4	Kasi Kecamatan	4	-	-	-	3	1	4
5	JFU Kecamatan	5	4	-	2	7	-	9
6	JFT Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		13	4	-	2	13	2	17

Sumber : Sekretariat Kecamatan Randudongkal, 2025

Tabel 2.2.
Pegawai Non ASN Kecamatan Randudongkal

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tenaga Administrasi	5	5	10
2	Tenaga Keamanan	2	-	2
3	Pengemudi	1	-	1
4	Tenaga Kebersihan	2	-	2
Jumlah		10	5	15

Sumber : Sekretariat Kecamatan Randudongkal, 2025

Pegawai Kecamatan Randudongkalseluruhnya berjumlah 32 orang, meliputi 23orang laki-laki dan 9 orang perempuan, sehinggadapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Randudongkal dominan laki-lakiyaitu sebanyak 71,88%.Agar Kecamatan Randudongkal menerapkan responsif gender, untuk perekrutan Pegawai ASN selanjutnya disarankan berjenis kelamin perempuan.

Selanjutnya jumlah Pegawai PNS berdasar golongan, meliputi golongan II sebanyak 2 orang, golongan III sebanyak 13 orang dan golongan IV sebanyak 2 orang, sehinggadapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Randudongkal dominan bergolongan III yaitu sebanyak 76,47%.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.3.
Data StrukturalBerdasar Diklat Kepemimpinan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Diklatpim III	-	-	-
2	Diklatpim IV	3	3	-
3	ADUM	-	-	-
4	SEPADA	-	-	-
5	Struktural yang belum diklat	5	5	-
Jumlah		8	8	-

Sumber : Sekretariat Kecamatan Randudongkal 2025

Jumlah struktural berdasarkan diklat kepemimpinan pada Kecamatan Randudongkal, yaitu 3 orang sudah mengikuti Diklatpim IV, dan 5 orang belum mengikuti diklat kepemimpinan,hal ini disebabkan masih menunggu penyelenggaraan diklat dari instansi yang berwenang.

Tabel 2.4.
Data Pegawai ASN dan Non ASN
Berdasar Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pasca Sarjana (S2)	1	1	-
2	Sarjana (S1)	15	10	5
3	Diploma	2	-	2
4	SLTA	10	8	2
5	SLTP	3	3	-
6	SD	1	1	-
Jumlah		32	23	9

Sumber : Sekretariat Kecamatan Randudongkal 2025

Jumlah pegawai Kecamatan Randudongkalberdasar tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S2) sebanyak 1 orang, Sarjana (S1) sebanyak 15orang, Diploma sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 10 orang dan SD sebanyak 1 orang, sehinggadapat disimpulkan bahwa secara kualitas SDM di Kecamatan Randudongkal sudah tercukupi, yaitu dengan prosentaseberpendidikan S1 sebanyak 46,88% dan SMA sebanyak 31,25%.

Tabel 2.5.
Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	IIIA	1	1	-
2	IIIB	-	-	-
3	IVA	7	7	-
4	IVB	-	-	-
Jumlah		8	8	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sumber : Sekretariat Kecamatan Randudongkal2025

Jumlah pegawai Kecamatan Randudongkalberdasarkan eselon hanya terdapat 2 (du) yaitu Eselon IIIA sebanyak1 orang dan eselon IVA sebanyak7 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Kecamatan Randudongkal berdasarkan tingkat eselon dominanadalah eselon IVA yaitu sebanyak 87,50%.

b. Sarana dan Prasarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Kecamatan Randudongkaldapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6.
Inventaris Aset Kecamatan Randudongkal

No	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Jumlah Harga (Rp)
					Baik	Sedang	Rusak	
1	01		Tanah					
		01	Tanah					
			Jumlah KIB A	-	-	-	-	-
2	01		Peralatan dan Mesin					
		02	Alat-alat Besar					
		03	Alat-alat Angkutan/Kendaraan	13	-	13	-	504.514.030
		04	Alat Bengkel dan Alat Ukur					
		05	Alat Pertanian					
		06	Alat Kantor & Rumah Tangga	458	458	-	-	509.367.820
		07	Alat Studio& Alat Komunikasi					
		08	Alat-alat Kedokteran					
		09	Alat Laboratorium					
		10	Alat-alat persenjataan/keamanan					
			Jumlah KIB B	**471**	**458**	**13**	**-**	**1.013.881.850**
3	03		Gedung dan Bangunan					
		11	Bangunan Gedung	11	-	11	-	1.178.458.000
		12	Monumen					
			Jumlah KIB C	**11**	**-**	**11**	**-**	**1.178.458.000**
4	04		Jalan, Irigasi dan Jaringan					
		13	Jalan & Jembatan					
		14	Bangunan Air/Irigasi					
		15	Instalasi					
		16	Jaringan	1	1	-	-	500.000
			Jumlah KIB D	**1**	**1**	**-**	**-**	**500.000**
5	05		Aset Tetap Lainnya					
		17	Buku dan Perpustakaan					
		18	Barang Bercorak Kebudayaan					
		19	Hewan, Ternak dan Tanaman					
			Jumlah KIB E	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6	06		Konstruksi dalam Pengerjaan					
			Jumlah KIB F	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Jumlah Harga (Rp)
					Baik	Sedang	Rusak	
			Jumlah Total	**483**	**459**	**24**	**-**	**2.192.839.850**

Sumber : Sekretariat Kecamatan Randudongkal, 2025

c. Administrasi Kewilayahan

Terdapat 17 desadi Kecamatan Randudongkaldengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.7.
Administrasi Kewilayahan Kecamatan Randudongkal

No	Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT	Jumlah Perangkat Desa& Kades	Jumlah Linmas	Ket
1	Banjarsari	2	2	12	8	20	
2	Bantarbolang	6	6	48	15	25	
3	Glandang	2	2	12	8	10	
4	Karanganyar	5	5	14	12	10	
5	Kebon Gede	6	6	24	11	6	
6	Kuta	6	6	24	12	10	
7	Lenggerong	1	1	5	9	17	
8	Pabuaran	2	2	6	10	10	
9	Peguyangan	7	7	20	11	55	
10	Pedagung	6	6	22	12	35	
11	Pegiringan	5	5	49	14	20	
12	Purana	5	5	17	11	25	
13	Sambeng	3	13	3	9	17	
14	Sarwodadi	1	1	5	9	11	
15	Sumurkidang	7	7	20	13	10	
16	Suru	3	3	20	14	6	
17	Wanarata	12	12	53	17	59	
Jumlah		79	362	79	183	346	

Sumber : Sekretariat Kecamatan Randudongkal, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Randudongkal

Gambaran kinerja pelayanan Kecamatan RandudongkalTahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan Tabel 2.9 berikut :

Tabel 2.8.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan RandudongkalKabupaten Pemalang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Cakupan layanan masyarakat	%	96,47	0	0	94.49	94,69	96,07	0	0	81,12	83,20	96,07	0	0	85,85	87,86	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kecamatan	indeks	99,73	78	78,00	80	82	84	77,79	78	80,63	82,94	82,50	99,73	100	100,78	101,15	136,82
3	SAKIP	nilai	-	47	44,89	46,89	48,89	60,30	42,89	47,00	52,45	54,35	60,40	91,26	104,70	111,86	111,17	100,17
4	Prosentase penyerapan Anggraan	%	-	96	100	96	0	0	98,40	100	97,92	0	0	102,50	100	102	0	0
4	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	indeks	-	0	9,72	11,72	12,72	13,72	0	9,72	11,72	0	0	0	100	100	0	0
5	Prosentase Kelengkapan administrasi desa binaan	%	-	84	84,00	0	0	0	100	84,00	0	0	0	119,05	100	0	0	0
6	Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan publik	%	-	83	83,00	0	0	0	83,17	83,00	0	0	0	100,25	100	0	0	0
7	Prosentase penanganan pengaduan masyarakat	%	-	83	83,00	0	0	0	100	83,00	0	0	0	120,48	100	0	0	0
8	Persentase pelayanan publik yang tersedia	%	-	0	0	92,22	92,22	92,22	0	0	87,50	100	92,22	0	0	94,88	108,43	100
9	Persentase Masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%	-	0	0	92,00	100	94,00	0	0	75,00	150	94,00	0	0	81,52	150	100
10	Persentase gangguan trantibum Tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%	-	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
11	Persentase potensi konflik Tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	-	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
12	Persentase desa bertata Kelola pemerintahan baik	%	-	0	0	88,24	88,24	94,12	0	0	71,76	100	94,12	0	0	81,32	113,33	100

Sumber : Kecamatan Randudongkal, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

Semua pelayanan kinerja yang dilakukan oleh Kecamatan Randudongkalhampir dapat mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini didukung adanya komitmen oleh semua pihak dan ketersediaan sarana dan prasarana yang mencukupi

Tabel 2.9.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan RandudongkalKabupaten Pemalang
Tahun 2020-2024Sesuai Bab II Rancangan Awal RPJMD tahun 2025 – 2029

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	%	100	100	100	100	100
2	Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	%	76,67	76,67	74,00	100	100
3	Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan	%	90	100	100	100	100
4	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi	%	16,67	16,67	16,67	16,67	94
5	Persentase jalan kewenangan kelurahan kondisi baik	%	NA	NA	NA	NA	NA
6	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	%	100	100	100	100	100
7	Jumlah potensi konflik	kasus	0	0	4	0	0
8	Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik	%	88,24	99,64	81,32	88,24	94,12

Sumber : Kecamatan Randudongkal, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.10.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang

No	Indikator Kinerja	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	537.343.000	0	0	0	0	520.687.000	0	0	0	0	96,90	0	0	0	0	0	0
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	212.256.000	0	0	0	0	212.256.000	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian keuangan	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
4	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran	30.320.000	0	0	0	0	30.320.000	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
6	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	0	780.619.000	2.867.772.710	2.460.636.770	2.935.760.608	0	777.947.800	2.625.283.960	2.408.020.850	2.808.891.442	0	99,65	92,00	97,86	95,68	69,00	65,27
7	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	0	41.390.000	24.359.000	2.047.500	2.207.332	0	40.940.000	25.309.000	2.047.500	2.206.000	0	98,91	104,00	100	99,94	-23,67	-24,88
8	Program pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	0	69.180.000	13.565.100	15.955.000	29.103.000	0	60.480.000	15.546.600	15.955.000	29.103.000	0	87,42	114,61	100	100	-14,49	-12,97
9	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	0	15.520.000	5.780.000	1.630.000	16.000.000	0	15.520.000	5.780.000	1.630.000	16.000.000	0	100	100	100	100	0,78	0,78
10	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	0	72.116.000	39.531.181	39.437.000	66.150.000	0	68.966.000	37.081.181	38.992.000	66.150.000	0	95,63	94,00	98,87	100	-2,07	-1,02
11	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	0				5.000.	0	82.875.000	4.000.000	2.760.980	2.850.	0	99,64	40,04	100	57,00	-23,50	-24,14

Sumber : Kecamatan Randudongkal, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Randudongkal

Kecamatan Randudongkal dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang danPemerintah Desa. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untukmembawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisilingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena ituanalisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik dilingkunganinternal maupun di lingkungan eksternal.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Randudongkal tahun 2025-2029, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Randudongkal adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Masih adamasyarakat yang belum patuhterhadap ketentraman dan ketertiban umumdi tingkat desadan kecamatan;
4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa dan kecamatan;
5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahdesa dalam tata kelola pemerintahan.

Beberapa peluangyang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Randudongkal adalah sebagai berikut:

1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya Perangkat Daerah dan Pendamping Desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa;
3. Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan;
4. Adanya Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desadan kecamatan;
5. Adanya Perangkat Daerah dan Pendamping Desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa.

2.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Randudongkal

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan,Kecamatan Randudongkal sebagai PD mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Randudongkal dapat dilihat dalam tabel 2.11 berikut :

Tabel 2.11.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Randudongkal

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia	Masih terbatasnya jenis data pemerintahan yang dipublikasi	Masih terbatasnya data pemerintahan yang tersedia
		Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat	Belum tersedianya SOP pelayanan yang sesuai kebutuhan
			Masih kurangnya peran Kecamatan dalam pencapaian SPM
		Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat	Masih terdapat ketidaksesuaian data masyarakat miskin
2	Masih rendahnya peran serta masyarakat desa		Masih rendahnya tingkat partisipasi musrenbang desa
		Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Masih rendahnya tingkat partisipasi Musrenbang Kecamatan
			Belum optimalnya pendampingan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten
		Belum optimalnya peran serta lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Masih rendahnya sarana prasarana yang dimiliki lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan
			Masih rendahnya kapasitas pengelola lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan
3	Belum optimalnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Masih rendahnya linmas yang mempunyai kompetensi	Belum optimalnya koordinasi dengan Polsek dan Koramil
			Masih terbatasnya Linmas yang mengikuti pelatihan
		Belum optimalnya koordinasi penegakkan Perda/Perbup	Belum optimalnya koordinasi monitoring penegakkan Perda/Perbup
4	Masih terjadi potensi konflik	Masih banyak masyarakat yang	Belum optimalnya peringatan hari

https://jdih.pemalangkab.go.id

	di tingkat desa dan kecamatan	belum paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	besar nasional dan hari besar agama sebagai upaya menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
			Masih minimnya pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di tingkat desa dan kecamatan
			Belum optimalnya penanganan potensi konflik sosial
			Perlu ditingkatkannya koordinasi antar pimpinan di Kecamatan
5	Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait tata kelola pemerintahan desa	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Masih banyak desa yang belum mampu menyusun Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
			Masih banyak desa yang belum mampu melaksanakan administrasi tata pemerintahan desa dengan tertib
			Masih banyak desa yang belum mampu mengelola keuangan desa dan mendayagunakan aset desa
			Belum optimalnya pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa
			Ada desa yang mengadakan pemilihan kepala desa
			Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
			Ada desa yang mengangkat dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

			memberhentikan perangkat desa
			Belum optimalnya fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
			Belum optimalnya fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
			Belum optimalnya fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa

Pengarusutamaan gender diterapkan oleh Kecamatan Randudongkal pada kegiatan Musrenbang Kecamatan, dimana perwakilan kelompok perempuan menjadi salah satu komponen peserta. Pengarusutamaan gender diterapkan juga dalam fasilitasi lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yaitu fasilitasi kepada PKK dan Posyandu.

2.6. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Penelaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Randudongkal yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah :

“PEMALANG BERCAHAYA - BERSIH CAKAPHANDAL, MULYA”

Visi ini memiliki pembentuk kata :

1. **Bersih :** Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungandan bersih dalam tata kelola pemerintahan
2. **Cakap:** dimaknai memiliki Sumber Daya Manusia yangunggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang denganmemanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yangmenggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia,unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkanpotensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaringnasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
3. **Handal :** dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yangdapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yangtangguh. Kondisi

https://jdih.pemalangkab.go.id

dimana pemerintahan yang Tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dansaling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsurmasyarakatnya.

4. **MULYA**: Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisidimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien,inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensisumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitaslingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan local sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi Masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupanmasyarakat yang kondusif, harmonis dan religius.

Dalam rangka mencapai visi diatasberikut ini Misi RPJMD 2025-2029berdasarkan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yaitu:

1. **Misi 1 Resik**: menciptakan budaya dan lingkungan yangbersih.Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkunganyang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitasudara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadibagian dari Resik
2. **Misi 2 Hijau**: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejukdan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan.Misi ini mengandung pengertian Pemerintah KabupatenPemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian denganmendorong kontribusi sektor unggulan, Pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau,yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian,perikanan) yang ramah lingkungan, industri hijau Dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorongsirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan danUMKM dimasyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapatmengolah sampah yang dihasilkan.
3. **Misi 3 Apik**: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagaiwilayah yang dikelola dengan baik dan ramah.Misi ini mengandung pengertian Pemerintah KabupatenPemalang akan menciptakan penaatan wilayah denganinfrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan inimenyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dariDesa
4. **Misi 4 Peduli**: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas,peduli dan milik semua lapisan Masyarakat. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah KabupatenPemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik daripendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater,pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yangmemiliki prestasi
5. **Misi 5 Silaturahmi**: meningkatkan masyarakat yang rukun,guyub, gotong royong,tepa selira dan Sejahtera. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah KabupatenPemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnyadengan cara bergotong royong, dan saling menghormati danteposliro
6. **Misi 6 Organisatoris**: meningkatkan Pemerintahan yangtertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi.Misi ini mengandung pengertian Pemerintah KabupatenPemalang akan mewujudkan *Good Governance, CleanGovernance* dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.
7. **Misi 7 Digitalisasi**: memanfaatkan teknologi informasi danperkembangannya dalam memajukan kualitas Masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yangpintar. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah kabupatenPemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi ataupenggunaan teknologi dalam pelayanan publik danpenyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan ReformasiBirokrasi

https://jdih.pemalangkab.go.id

8. **Misi 8 Ikhlas**: menghadirkan kembali kehidupan spiritual,kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalanguntuk semua kalangan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, amandengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkankearifan dan budaya lokal.

Sesuai dengan Misi Bupati Pemalang di atas, maka Kecamatan Randudongkal mendukung misi Bupati tersebut yaitu **Misi Ke 6 (Organisatoris : meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi.**
Misi ini mengandung pengertian Pemerintah KabupatenPemalang akan mewujudkan *Good Governance, CleanGovernance* dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik).

Tujuan untuk mencapai visi dan misi Bupati danWakil Bupati Pemalang adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih sehat dannyaman.
2. Meningkatkan daya saing pembangunan daerah
3. Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat danpenanggulangan kemiskinan
4. Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis,yang menciptakan keamanan dengan nilai-nilai budaya dankegotong-royongan
5. Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan danakuntabel.

Dimana tujuan dari Kecamatan Randudongkal adalah **Meningkatnya pelayanan publik yang prima**, sesuai dengan tujuan Bupati yang ke 5 (lima) yaitu meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel.

Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerjayang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menujutercapainya tujuan RPJMD. Sasaran pembangunan jangkamenengah adalah sebagai berikut:
1. Tujuan 1 Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersihsehat dan nyaman dengan sasarannya : Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan sertapengelolaan sampah
2. Tujuan 2 Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersihtransparan dan akuntabel dengan sasaran sebagai berikut:Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif,efisien, dengan pelayanan publik yang baik
3. Tujuan 3 Meningkatkan daya saing pembangunan daerahdengan sasaran sebagai berikut :
   a. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dengan potensiekonomi lokal
   b. Meningkatnya kualitas SDM daerah
   c. Meningkatnya kemandirian pangan
   d. Meningkatnya pengendalian harga bahan pokok danpenting
   e. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yangberkualitas dan merata
   f. Meningkatnya kualitas pembangunan desa dan Kawasan perdesaan
   g. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender
   h. Meningkatnya kualitas riset dan inovasi

4. Tujuan 4 Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat danpenanggulangan kemiskinan dengan sasaran sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

a. Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat
b. Meningkatnya penanganan pengangguran

5. Tujuan 5 Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yangharmonis, yang menciptakan keamanan dengan nilai nilaibudaya dan kegotong-royongan dengan sasaran sebagaiberikut:
   a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hidupberdampingan secara harmonis dan kondusif
   b. Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapibencana
   c. Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal

Berdasarkan sasaran RPJMD 2025-2029 diatas maka Kecamatan Randudongkal mempunyai 2 (dua) sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan
2. Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan

Uraian mengenai telaah visi, misi dan program prioritas Bupati dapat dilihat pada tabel 2.12. berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.12.
Telaah Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati

Misi/Program Prioritas	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
Visi : "PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA"				
Misi 6 : Meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi	1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1. Masih terbatasnya pelayanan kepada masyarkat	1. Ruang pelayanan belum memadai [2. Belum memiliki petugas pelayanan yang berstatus PNS 3. Petugas pelayanan belum memiliki sertifikat yang berkaitan dengan pelayanan Masih rendahnya kesadaran masyarakat	1. Perlu adanya peran pimpinan agar ruang pelayanan lebih memadai dengan memasukkan pada rencana anggaran kecamatan 2. Membuat usulan permintaan Tenaga PNS kepada BKD Kab.Pemalang 3. Memberi kesempatan kepada petugas pelayanan yang ada untuk mengikuti bimbingan teknis maupun studi banding ke kecamatan lain mapun OPD di sekitar Kab.Pemalang terkait pelayanan publik Perlu adanya dukungan fasilitasi pemberdayaan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Misi/Program Prioritas	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
			desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan	masyarakat desa/kelurahan yang lebih optimal dari Kecamatan dan Pendamping Desa
	2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	Peran Linmas yang ada di desa/kelurahan lebih dimaksimalkan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan desa/kelurahan
	3. Penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Belum optimalnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap kondisi di lingkungan sekitar desa/kelurahan dan kecamatan	Adanya FKDM dan Forkompimcam yang siap menangani potensi konfilik ditingkat desa/kelurahan dan kecamatan
	4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Masih terjadi potensi konflik ditingkat desa dan kecamatan	Masih rendahnya kemampuan/kapasitas dari aparatur desa/kelurahan dalam tata keloloa pemerintahan Masih perlu adanya	Adanya pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan pemerintah desa

https://jdih.pemalangkab.go.id

Misi/Program Prioritas	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
	5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 6. Penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Masih rendahnya desa terkait tata kelola pemerintahan desa Masih rendahnya nilai SAKIP yang diperoleh	perbaikan serta komitmen dalam manajemen kinerja pada kecamatan	Perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan implementasi SAKIP

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.7. Perumusan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan, pada tabel berikut dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 2.13.
Isu Strategsi Kecamatan Randudongkal

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	1. Menurunnya IRB 2. Masih rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan 3. Belum optimalnya penataan desa 4. Belum optimalnya data statistik yang dimiliki 5. Masihkurangnya Tingkat keamanan informasipemerintahan 6. Kurangnya pelestarian warisanbudaya 7. Belum optimalnya sarana danprasarana perpustakaan 8. Belum optimalnya koordinasiantar bidang 9. Belum optimalnya	Belum optimalnya budaya e-government	1. Krisis utang 2. Cyber Security	1. Tata kelola pemerintahan belum optimal 2. Kepastian danPenegakanhukum masihlemah 3. Demokratisasi belum optimal	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Reformasi tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi

https://jdih.pemalangkab.go.id

	dukunganuntuk pelaksanaan tugas danfungsi DPRD dan kurangnyakualitas SDM yang sesuaikompetensinya 10. Belum optimalnya kualitas SDMdan perencanaannya 11. Masih rendahnya PAD pajakdaerah yang diterima namunangka belanja daerah tinggi 12. Belum maksimalnya administrasikepegawaian 13. Masih kurangnya pemandaatan hasil penelitian dan pengembangan 14. Belum optimalnyaPenyelenggaraan pengawasan 15. Belum optimalnya pelayaan publik dan masih kurangnya SDM yangkompeten 16. Rasio belanja pegawai					

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN RANDUDONGKAL

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Randudongkal

Kecamatan Randudongkal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Randudongkal mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Randudongkal

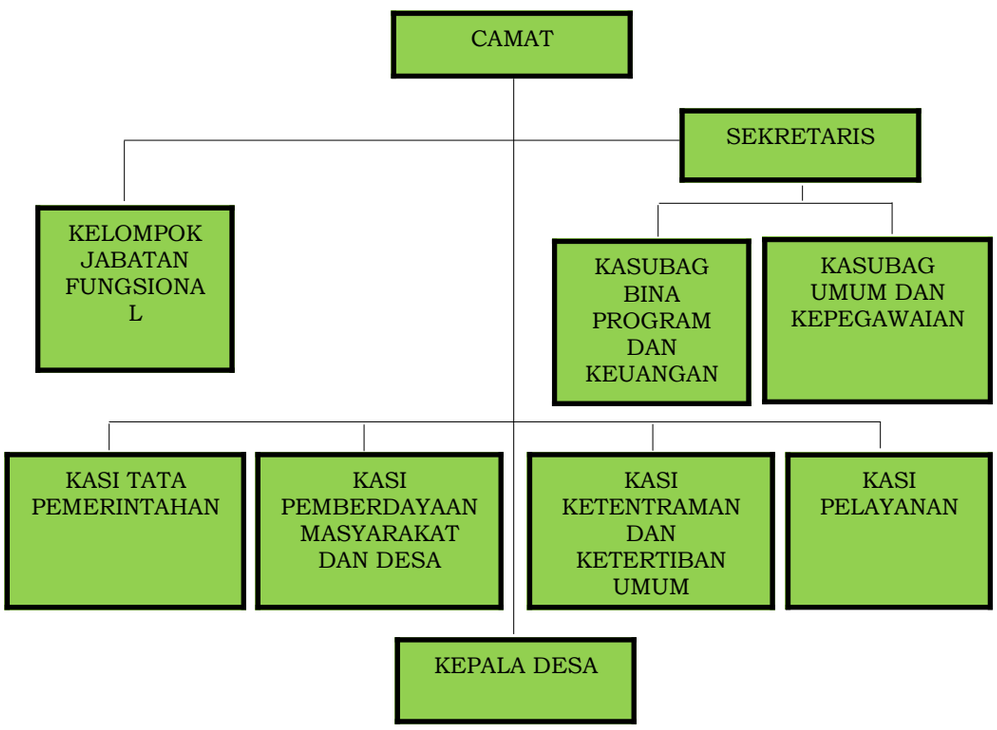

Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta

https://jdih.pemalangkab.go.id

melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

A. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Camat mempunyai uraian tugas :

1. Mengarahkan penyusunan dokumen perencanaan kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan organisasi, perencanaan partisipatif dan perencanaan yang lebih tinggi dan ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Merumuskan kebijakan kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Merumuskan inovasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
4. Mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan kecamatan, meliputi kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan umum dan kesekretariatan sesuai dengan tugas fungsi dan pedoman pelaksanaan agar tepat sasaran dan tujuan;
5. Mengarahkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan dengan melalui bimbingan, supervisi, fasilitasi dan evaluasi guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan;
6. Mengarahkan penyediaan dan pelayaan informasi publik serta penyusunan data dan informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
7. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsinya guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh PD kabupaten yang ada di kecamatan sesuai dengan petunjuk pimpinan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
9. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan Peraturan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
10. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;

https://jdih.pemalangkab.go.id

11. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Merumuskan laporan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kerja organisasi.

B. Sekretaris Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan kesekretariatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian sesuai dengan kebituhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
5. Mengoordinasikan penyusunan kondep inovasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
9. Melaksanakan tugas dan kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

a. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Menyusun konsep dokumen perencanaan Kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan oprganisasi, perencanaan partisipatif, dan perencanaanyang lebih tinggi guna dirumuskan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep laporan capaian kinerja Kecamatan yang meliputi LkjIP, laporan pelaksanaan APBD dan laporan kinerja lain

https://jdih.pemalangkab.go.id

berdasarkan Renja dan realisasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban;
5. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib adminstrasi;
6. Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan keuangan;
7. Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi LRA, LO, LPE, neraca dan CaLK serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;
8. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
10. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kecamata sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepasa pimpinan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai sengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengelola kegiatan administrasi surat menyurat, kepegawaian, penataan arsip, dokumentas, dan kearsipan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
4. Mengelola kegiatan kerumahtanggaan meliputi penyediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, pelayanan tamu dinas dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Mengelola administrasi barang milik daerah yang meliputi penyusunan analisa kebutuhan dan pemeliharaan barang, penatausahaan barang, dan penyusunan administrasi barang lainnya sesuai dengan peraturan pengelolaan barang milik daerah guna tertib administrasi;
6. Mengelola kegiatan ketatalaksanaan meliputi penyusunan standart dan prosedur kerja sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Mengelola kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi penyediaan dan pelayanan informasi publik, penyusunan data informasi

https://jdih.pemalangkab.go.id

Subbagian Umum dan Kepegawaian, pengaturan tata tempat dan tata acara serta kegiatan kehumasan dan keprotokolan lain sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

8. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta, dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan memeriksa berkas yang diajukan kepala desa sebagai bahan konsultasi kepada pimpinan guna disahkan oleh pimpinan;
5. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan melalui fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, fasilitasi pemberian tunjangan perangkat desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;
6. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Seksi Tata Pemerintahan meliputi data monografi desa, data perangkat desa dan data terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
8. Menyusun konsep motivasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;

https://jdih.pemalangkab.go.id

9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, keagamaan, pembinaan kesehatan, keluarga berencana, organisasi perempuan, pendidikan, pemuda dan olahraga dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan sosial desa melalui fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pembangunan desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjaama desa dengan pihak ketiga, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, koordinasi pendampingan desa, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial guna tertib administrasi dan kelancaran dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dengan melibatkan stakeholder terkait demi tercapainya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran;
6. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

https://jdih.pemalangkab.go.id

10. Menyusun laporan dan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawabkan kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan meliputi fasilitasi pengaduan masyarakat, kejadian musibag, bencana umum atau kejadian luar biasa lainnya serta upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lainnya dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan pemuka agama/tokoh masyarakat serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau desa/kelurahan serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna tegaknya peraturan;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah yang ada di wilayah kecamatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dan/atau swasta dan/atau pihak terkait lainnya sesuai dengan prosesur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keamanan dan terpeliharanya prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah;
6. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan yang bergerak di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
7. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kebutuhan informasi publik;

9. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;

https://jdih.pemalangkab.go.id

10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

f. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan kegiatan koordinasi terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan dan kabupaten, pemerintah desa/kelurahan, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep rencana operasional dan standar pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
5. Melaksanakan kegiatan fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan di bidang perizinan, non perizinan, administrasi pertanahan dan pelayanan administrasi lainnya sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dan pemeriksaan dokumen/berkas permohonan, cek lokasi apabila disyaratkan, pengesahan hingga penyampaian kembali dokumen/berkas kepada pemohon guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
6. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan prosedur dan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
7. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tercapainya kepuasan masyarakat;
8. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undanganguna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
9. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
10. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.2. Sumber Daya Kecamatan Randudongkal

Sumber daya Kecamatan Randudongkalsangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

a. Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Jumlah pegawai di Kecamatan Randudongkaldalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyakatan sosial tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.
Pegawai ASN Kecamatan Randudongkal

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Golongan				Jumlah
				I	II	III	IV	
1	Camat	1	-	-	-		1	1
2	Sekcam	1	-	-	-	1	-	1
3	Kasubag	2	-	-	-	2	-	2
4	Kasi Kecamatan	4	-	-	-	3	1	4
5	JFU Kecamatan	5	4	-	2	7	-	9
6	JFT Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		13	4	-	2	13	2	17

Sumber : Sekretariat Kecamatan Randudongkal, 2025

Tabel 2.2.
Pegawai Non ASN Kecamatan Randudongkal

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tenaga Administrasi	5	5	10
2	Tenaga Keamanan	2	-	2
3	Pengemudi	1	-	1
4	Tenaga Kebersihan	2	-	2
Jumlah		10	5	15

Sumber : Sekretariat Kecamatan Randudongkal, 2025

Pegawai Kecamatan Randudongkalseluruhnya berjumlah 32 orang, meliputi 23orang laki-laki dan 9 orang perempuan, sehinggadapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Randudongkal dominan laki-lakiyaitu sebanyak 71,88%.Agar Kecamatan Randudongkal menerapkan responsif gender, untuk perekrutan Pegawai ASN selanjutnya disarankan berjenis kelamin perempuan.

Selanjutnya jumlah Pegawai PNS berdasar golongan, meliputi golongan II sebanyak 2 orang, golongan III sebanyak 13 orang dan golongan IV sebanyak 2 orang, sehinggadapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Randudongkal dominan bergolongan III yaitu sebanyak 76,47%.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.3.
Data StrukturalBerdasar Diklat Kepemimpinan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Diklatpim III	-	-	-
2	Diklatpim IV	3	3	-
3	ADUM	-	-	-
4	SEPADA	-	-	-
5	Struktural yang belum diklat	5	5	-
Jumlah		8	8	-

Sumber : Sekretariat Kecamatan Randudongkal 2025

Jumlah struktural berdasarkan diklat kepemimpinan pada Kecamatan Randudongkal, yaitu 3 orang sudah mengikuti Diklatpim IV, dan 5 orang belum mengikuti diklat kepemimpinan,hal ini disebabkan masih menunggu penyelenggaraan diklat dari instansi yang berwenang.

Tabel 2.4.
Data Pegawai ASN dan Non ASN
Berdasar Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pasca Sarjana (S2)	1	1	-
2	Sarjana (S1)	15	10	5
3	Diploma	2	-	2
4	SLTA	10	8	2
5	SLTP	3	3	-
6	SD	1	1	-
Jumlah		32	23	9

Sumber : Sekretariat Kecamatan Randudongkal 2025

Jumlah pegawai Kecamatan Randudongkalberdasar tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S2) sebanyak 1 orang, Sarjana (S1) sebanyak 15orang, Diploma sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 10 orang dan SD sebanyak 1 orang, sehinggadapat disimpulkan bahwa secara kualitas SDM di Kecamatan Randudongkal sudah tercukupi, yaitu dengan prosentaseberpendidikan S1 sebanyak 46,88% dan SMA sebanyak 31,25%.

Tabel 2.5.
Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	IIIA	1	1	-
2	IIIB	-	-	-
3	IVA	7	7	-
4	IVB	-	-	-
Jumlah		8	8	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sumber : Sekretariat Kecamatan Randudongkal2025

Jumlah pegawai Kecamatan Randudongkalberdasarkan eselon hanya terdapat 2 (du) yaitu Eselon IIIA sebanyak1 orang dan eselon IVA sebanyak7 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Kecamatan Randudongkal berdasarkan tingkat eselon dominanadalah eselon IVA yaitu sebanyak 87,50%.

b. Sarana dan Prasarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Kecamatan Randudongkaldapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6.
Inventaris Aset Kecamatan Randudongkal

No	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Jumlah Harga (Rp)
					Baik	Sedang	Rusak	
1	01		Tanah					
		01	Tanah					
			Jumlah KIB A	-	-	-	-	-
2	01		Peralatan dan Mesin					
		02	Alat-alat Besar					
		03	Alat-alat Angkutan/Kendaraan	13	-	13	-	504.514.030
		04	Alat Bengkel dan Alat Ukur					
		05	Alat Pertanian					
		06	Alat Kantor & Rumah Tangga	458	458	-	-	509.367.820
		07	Alat Studio& Alat Komunikasi					
		08	Alat-alat Kedokteran					
		09	Alat Laboratorium					
		10	Alat-alat persenjataan/keamanan					
			Jumlah KIB B	**471**	**458**	**13**	**-**	**1.013.881.850**
3	03		Gedung dan Bangunan					
		11	Bangunan Gedung	11	-	11	-	1.178.458.000
		12	Monumen					
			Jumlah KIB C	**11**	**-**	**11**	**-**	**1.178.458.000**
4	04		Jalan, Irigasi dan Jaringan					
		13	Jalan & Jembatan					
		14	Bangunan Air/Irigasi					
		15	Instalasi					
		16	Jaringan	1	1	-	-	500.000
			Jumlah KIB D	**1**	**1**	**-**	**-**	**500.000**
5	05		Aset Tetap Lainnya					
		17	Buku dan Perpustakaan					
		18	Barang Bercorak Kebudayaan					
		19	Hewan, Ternak dan Tanaman					
			Jumlah KIB E	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6	06		Konstruksi dalam Pengerjaan					
			Jumlah KIB F	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Jumlah Harga (Rp)
					Baik	Sedang	Rusak	
			Jumlah Total	**483**	**459**	**24**	**-**	**2.192.839.850**

Sumber : Sekretariat Kecamatan Randudongkal, 2025

c. Administrasi Kewilayahan

Terdapat 17 desadi Kecamatan Randudongkaldengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.7.
Administrasi Kewilayahan Kecamatan Randudongkal

No	Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT	Jumlah Perangkat Desa& Kades	Jumlah Linmas	Ket
1	Banjarsari	2	2	12	8	20	
2	Bantarbolang	6	6	48	15	25	
3	Glandang	2	2	12	8	10	
4	Karanganyar	5	5	14	12	10	
5	Kebon Gede	6	6	24	11	6	
6	Kuta	6	6	24	12	10	
7	Lenggerong	1	1	5	9	17	
8	Pabuaran	2	2	6	10	10	
9	Peguyangan	7	7	20	11	55	
10	Pedagung	6	6	22	12	35	
11	Pegiringan	5	5	49	14	20	
12	Purana	5	5	17	11	25	
13	Sambeng	3	13	3	9	17	
14	Sarwodadi	1	1	5	9	11	
15	Sumurkidang	7	7	20	13	10	
16	Suru	3	3	20	14	6	
17	Wanarata	12	12	53	17	59	
Jumlah		79	362	79	183	346	

Sumber : Sekretariat Kecamatan Randudongkal, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Randudongkal

Gambaran kinerja pelayanan Kecamatan RandudongkalTahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan Tabel 2.9 berikut :

Tabel 2.8.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan RandudongkalKabupaten Pemalang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Cakupan layanan masyarakat	%	96,47	0	0	94.49	94,69	96,07	0	0	81,12	83,20	96,07	0	0	85,85	87,86	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kecamatan	indeks	99,73	78	78,00	80	82	84	77,79	78	80,63	82,94	82,50	99,73	100	100,78	101,15	136,82
3	SAKIP	nilai	-	47	44,89	46,89	48,89	60,30	42,89	47,00	52,45	54,35	60,40	91,26	104,70	111,86	111,17	100,17
4	Prosentase penyerapan Anggraan	%	-	96	100	96	0	0	98,40	100	97,92	0	0	102,50	100	102	0	0
4	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	indeks	-	0	9,72	11,72	12,72	13,72	0	9,72	11,72	0	0	0	100	100	0	0
5	Prosentase Kelengkapan administrasi desa binaan	%	-	84	84,00	0	0	0	100	84,00	0	0	0	119,05	100	0	0	0
6	Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan publik	%	-	83	83,00	0	0	0	83,17	83,00	0	0	0	100,25	100	0	0	0
7	Prosentase penanganan pengaduan masyarakat	%	-	83	83,00	0	0	0	100	83,00	0	0	0	120,48	100	0	0	0
8	Persentase pelayanan publik yang tersedia	%	-	0	0	92,22	92,22	92,22	0	0	87,50	100	92,22	0	0	94,88	108,43	100
9	Persentase Masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%	-	0	0	92,00	100	94,00	0	0	75,00	150	94,00	0	0	81,52	150	100
10	Persentase gangguan trantibum Tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%	-	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
11	Persentase potensi konflik Tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	-	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
12	Persentase desa bertata Kelola pemerintahan baik	%	-	0	0	88,24	88,24	94,12	0	0	71,76	100	94,12	0	0	81,32	113,33	100

Sumber : Kecamatan Randudongkal, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

Semua pelayanan kinerja yang dilakukan oleh Kecamatan Randudongkalhampir dapat mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini didukung adanya komitmen oleh semua pihak dan ketersediaan sarana dan prasarana yang mencukupi

Tabel 2.9.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan RandudongkalKabupaten Pemalang
Tahun 2020-2024Sesuai Bab II Rancangan Awal RPJMD tahun 2025 – 2029

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	%	100	100	100	100	100
2	Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	%	76,67	76,67	74,00	100	100
3	Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan	%	90	100	100	100	100
4	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi	%	16,67	16,67	16,67	16,67	94
5	Persentase jalan kewenangan kelurahan kondisi baik	%	NA	NA	NA	NA	NA
6	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	%	100	100	100	100	100
7	Jumlah potensi konflik	kasus	0	0	4	0	0
8	Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik	%	88,24	99,64	81,32	88,24	94,12

Sumber : Kecamatan Randudongkal, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.10.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang

No	Indikator Kinerja	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	537.343.000	0	0	0	0	520.687.000	0	0	0	0	96,90	0	0	0	0	0	0
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	212.256.000	0	0	0	0	212.256.000	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian keuangan	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
4	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran	30.320.000	0	0	0	0	30.320.000	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
6	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	0	780.619.000	2.867.772.710	2.460.636.770	2.935.760.608	0	777.947.800	2.625.283.960	2.408.020.850	2.808.891.442	0	99,65	92,00	97,86	95,68	69,00	65,27
7	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	0	41.390.000	24.359.000	2.047.500	2.207.332	0	40.940.000	25.309.000	2.047.500	2.206.000	0	98,91	104,00	100	99,94	-23,67	-24,88
8	Program pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	0	69.180.000	13.565.100	15.955.000	29.103.000	0	60.480.000	15.546.600	15.955.000	29.103.000	0	87,42	114,61	100	100	-14,49	-12,97
9	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	0	15.520.000	5.780.000	1.630.000	16.000.000	0	15.520.000	5.780.000	1.630.000	16.000.000	0	100	100	100	100	0,78	0,78
10	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	0	72.116.000	39.531.181	39.437.000	66.150.000	0	68.966.000	37.081.181	38.992.000	66.150.000	0	95,63	94,00	98,87	100	-2,07	-1,02
11	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	0				5.000.	0	82.875.000	4.000.000	2.760.980	2.850.	0	99,64	40,04	100	57,00	-23,50	-24,14

Sumber : Kecamatan Randudongkal, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Randudongkal

Kecamatan Randudongkal dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang danPemerintah Desa. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untukmembawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisilingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena ituanalisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik dilingkunganinternal maupun di lingkungan eksternal.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Randudongkal tahun 2025-2029, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Randudongkal adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Masih adamasyarakat yang belum patuhterhadap ketentraman dan ketertiban umumdi tingkat desadan kecamatan;
4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa dan kecamatan;
5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahdesa dalam tata kelola pemerintahan.

Beberapa peluangyang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Randudongkal adalah sebagai berikut:

1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya Perangkat Daerah dan Pendamping Desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa;
3. Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan;
4. Adanya Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desadan kecamatan;
5. Adanya Perangkat Daerah dan Pendamping Desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa.

2.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Randudongkal

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan,Kecamatan Randudongkal sebagai PD mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Randudongkal dapat dilihat dalam tabel 2.11 berikut :

Tabel 2.11.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Randudongkal

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia	Masih terbatasnya jenis data pemerintahan yang dipublikasi	Masih terbatasnya data pemerintahan yang tersedia
		Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat	Belum tersedianya SOP pelayanan yang sesuai kebutuhan
			Masih kurangnya peran Kecamatan dalam pencapaian SPM
		Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat	Masih terdapat ketidaksesuaian data masyarakat miskin
2	Masih rendahnya peran serta masyarakat desa		Masih rendahnya tingkat partisipasi musrenbang desa
		Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Masih rendahnya tingkat partisipasi Musrenbang Kecamatan
			Belum optimalnya pendampingan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten
		Belum optimalnya peran serta lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Masih rendahnya sarana prasarana yang dimiliki lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan
			Masih rendahnya kapasitas pengelola lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan
3	Belum optimalnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Masih rendahnya linmas yang mempunyai kompetensi	Belum optimalnya koordinasi dengan Polsek dan Koramil
			Masih terbatasnya Linmas yang mengikuti pelatihan
		Belum optimalnya koordinasi penegakkan Perda/Perbup	Belum optimalnya koordinasi monitoring penegakkan Perda/Perbup
4	Masih terjadi potensi konflik	Masih banyak masyarakat yang	Belum optimalnya peringatan hari

https://jdih.pemalangkab.go.id

	di tingkat desa dan kecamatan	belum paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	besar nasional dan hari besar agama sebagai upaya menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
			Masih minimnya pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di tingkat desa dan kecamatan
			Belum optimalnya penanganan potensi konflik sosial
			Perlu ditingkatkannya koordinasi antar pimpinan di Kecamatan
5	Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait tata kelola pemerintahan desa	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Masih banyak desa yang belum mampu menyusun Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
			Masih banyak desa yang belum mampu melaksanakan administrasi tata pemerintahan desa dengan tertib
			Masih banyak desa yang belum mampu mengelola keuangan desa dan mendayagunakan aset desa
			Belum optimalnya pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa
			Ada desa yang mengadakan pemilihan kepala desa
			Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
			Ada desa yang mengangkat dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

			memberhentikan perangkat desa
			Belum optimalnya fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
			Belum optimalnya fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
			Belum optimalnya fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa

Pengarusutamaan gender diterapkan oleh Kecamatan Randudongkal pada kegiatan Musrenbang Kecamatan, dimana perwakilan kelompok perempuan menjadi salah satu komponen peserta. Pengarusutamaan gender diterapkan juga dalam fasilitasi lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yaitu fasilitasi kepada PKK dan Posyandu.

2.6. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Penelaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Randudongkal yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah :

“PEMALANG BERCAHAYA - BERSIH CAKAPHANDAL, MULYA”

Visi ini memiliki pembentuk kata :

1. **Bersih :** Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungandan bersih dalam tata kelola pemerintahan
2. **Cakap:** dimaknai memiliki Sumber Daya Manusia yangunggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang denganmemanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yangmenggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia,unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkanpotensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaringnasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
3. **Handal :** dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yangdapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yangtangguh. Kondisi

https://jdih.pemalangkab.go.id

dimana pemerintahan yang Tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dansaling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsurmasyarakatnya.

4. **MULYA**: Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisidimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien,inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensisumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitaslingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan local sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi Masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupanmasyarakat yang kondusif, harmonis dan religius.

Dalam rangka mencapai visi diatasberikut ini Misi RPJMD 2025-2029berdasarkan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yaitu:

1. **Misi 1 Resik**: menciptakan budaya dan lingkungan yangbersih.Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkunganyang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitasudara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadibagian dari Resik
2. **Misi 2 Hijau**: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejukdan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan.Misi ini mengandung pengertian Pemerintah KabupatenPemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian denganmendorong kontribusi sektor unggulan, Pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau,yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian,perikanan) yang ramah lingkungan, industri hijau Dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorongsirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan danUMKM dimasyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapatmengolah sampah yang dihasilkan.
3. **Misi 3 Apik**: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagaiwilayah yang dikelola dengan baik dan ramah.Misi ini mengandung pengertian Pemerintah KabupatenPemalang akan menciptakan penaatan wilayah denganinfrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan inimenyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dariDesa
4. **Misi 4 Peduli**: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas,peduli dan milik semua lapisan Masyarakat. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah KabupatenPemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik daripendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater,pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yangmemiliki prestasi
5. **Misi 5 Silaturahmi**: meningkatkan masyarakat yang rukun,guyub, gotong royong,tepa selira dan Sejahtera. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah KabupatenPemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnyadengan cara bergotong royong, dan saling menghormati danteposliro
6. **Misi 6 Organisatoris**: meningkatkan Pemerintahan yangtertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi.Misi ini mengandung pengertian Pemerintah KabupatenPemalang akan mewujudkan *Good Governance, CleanGovernance* dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.
7. **Misi 7 Digitalisasi**: memanfaatkan teknologi informasi danperkembangannya dalam memajukan kualitas Masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yangpintar. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah kabupatenPemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi ataupenggunaan teknologi dalam pelayanan publik danpenyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan ReformasiBirokrasi

https://jdih.pemalangkab.go.id

8. **Misi 8 Ikhlas**: menghadirkan kembali kehidupan spiritual,kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalanguntuk semua kalangan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, amandengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkankearifan dan budaya lokal.

Sesuai dengan Misi Bupati Pemalang di atas, maka Kecamatan Randudongkal mendukung misi Bupati tersebut yaitu **Misi Ke 6 (Organisatoris : meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi.**
Misi ini mengandung pengertian Pemerintah KabupatenPemalang akan mewujudkan *Good Governance, CleanGovernance* dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik).

Tujuan untuk mencapai visi dan misi Bupati danWakil Bupati Pemalang adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih sehat dannyaman.
2. Meningkatkan daya saing pembangunan daerah
3. Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat danpenanggulangan kemiskinan
4. Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis,yang menciptakan keamanan dengan nilai-nilai budaya dankegotong-royongan
5. Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan danakuntabel.

Dimana tujuan dari Kecamatan Randudongkal adalah **Meningkatnya pelayanan publik yang prima**, sesuai dengan tujuan Bupati yang ke 5 (lima) yaitu meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel.

Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerjayang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menujutercapainya tujuan RPJMD. Sasaran pembangunan jangkamenengah adalah sebagai berikut:
1. Tujuan 1 Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersihsehat dan nyaman dengan sasarannya : Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan sertapengelolaan sampah
2. Tujuan 2 Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersihtransparan dan akuntabel dengan sasaran sebagai berikut:Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif,efisien, dengan pelayanan publik yang baik
3. Tujuan 3 Meningkatkan daya saing pembangunan daerahdengan sasaran sebagai berikut :
   a. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dengan potensiekonomi lokal
   b. Meningkatnya kualitas SDM daerah
   c. Meningkatnya kemandirian pangan
   d. Meningkatnya pengendalian harga bahan pokok danpenting
   e. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yangberkualitas dan merata
   f. Meningkatnya kualitas pembangunan desa dan Kawasan perdesaan
   g. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender
   h. Meningkatnya kualitas riset dan inovasi

4. Tujuan 4 Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat danpenanggulangan kemiskinan dengan sasaran sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

a. Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat
b. Meningkatnya penanganan pengangguran

5. Tujuan 5 Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yangharmonis, yang menciptakan keamanan dengan nilai nilaibudaya dan kegotong-royongan dengan sasaran sebagaiberikut:
   a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hidupberdampingan secara harmonis dan kondusif
   b. Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapibencana
   c. Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal

Berdasarkan sasaran RPJMD 2025-2029 diatas maka Kecamatan Randudongkal mempunyai 2 (dua) sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan
2. Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan

Uraian mengenai telaah visi, misi dan program prioritas Bupati dapat dilihat pada tabel 2.12. berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.12.
Telaah Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati

Misi/Program Prioritas	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
Visi : "PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA"				
Misi 6 : Meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi	1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1. Masih terbatasnya pelayanan kepada masyarkat	1. Ruang pelayanan belum memadai [2. Belum memiliki petugas pelayanan yang berstatus PNS 3. Petugas pelayanan belum memiliki sertifikat yang berkaitan dengan pelayanan Masih rendahnya kesadaran masyarakat	1. Perlu adanya peran pimpinan agar ruang pelayanan lebih memadai dengan memasukkan pada rencana anggaran kecamatan 2. Membuat usulan permintaan Tenaga PNS kepada BKD Kab.Pemalang 3. Memberi kesempatan kepada petugas pelayanan yang ada untuk mengikuti bimbingan teknis maupun studi banding ke kecamatan lain mapun OPD di sekitar Kab.Pemalang terkait pelayanan publik Perlu adanya dukungan fasilitasi pemberdayaan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Misi/Program Prioritas	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
			desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan	masyarakat desa/kelurahan yang lebih optimal dari Kecamatan dan Pendamping Desa
	2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	Peran Linmas yang ada di desa/kelurahan lebih dimaksimalkan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan desa/kelurahan
	3. Penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Belum optimalnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap kondisi di lingkungan sekitar desa/kelurahan dan kecamatan	Adanya FKDM dan Forkompimcam yang siap menangani potensi konfilik ditingkat desa/kelurahan dan kecamatan
	4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Masih terjadi potensi konflik ditingkat desa dan kecamatan	Masih rendahnya kemampuan/kapasitas dari aparatur desa/kelurahan dalam tata keloloa pemerintahan Masih perlu adanya	Adanya pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan pemerintah desa

https://jdih.pemalangkab.go.id

Misi/Program Prioritas	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
	5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 6. Penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Masih rendahnya desa terkait tata kelola pemerintahan desa Masih rendahnya nilai SAKIP yang diperoleh	perbaikan serta komitmen dalam manajemen kinerja pada kecamatan	Perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan implementasi SAKIP

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.7. Perumusan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan, pada tabel berikut dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 2.13.
Isu Strategsi Kecamatan Randudongkal

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	1. Menurunnya IRB 2. Masih rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan 3. Belum optimalnya penataan desa 4. Belum optimalnya data statistik yang dimiliki 5. Masihkurangnya Tingkat keamanan informasipemerintahan 6. Kurangnya pelestarian warisanbudaya 7. Belum optimalnya sarana danprasarana perpustakaan 8. Belum optimalnya koordinasiantar bidang 9. Belum optimalnya	Belum optimalnya budaya e-government	1. Krisis utang 2. Cyber Security	1. Tata kelola pemerintahan belum optimal 2. Kepastian danPenegakanhukum masihlemah 3. Demokratisasi belum optimal	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Reformasi tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi

https://jdih.pemalangkab.go.id

	dukunganuntuk pelaksanaan tugas danfungsi DPRD dan kurangnyakualitas SDM yang sesuaikompetensinya 10. Belum optimalnya kualitas SDMdan perencanaannya 11. Masih rendahnya PAD pajakdaerah yang diterima namunangka belanja daerah tinggi 12. Belum maksimalnya administrasikepegawaian 13. Masih kurangnya pemandaatan hasil penelitian dan pengembangan 14. Belum optimalnyaPenyelenggaraan pengawasan 15. Belum optimalnya pelayaan publik dan masih kurangnya SDM yangkompeten 16. Rasio belanja pegawai					

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maka Kecamatan Randudongkal menyusun program, kegiatan, sub kegiatan penyelenggaraan bidang urusan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang yang relevan dengan RPJMD 2025-2029. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dapat tersusun pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Kecamatan Randudongkal

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan						
		Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat			Nilai SKM Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Persesntase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	Program Penyelenggaraan Pemerintahandan Pelayanan Publik	
				Persentase dokumen pemerintahan yang dipublikasi	Jenis data pemerintah yang dipublikasi	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah	Subkegiatan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

					Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Persentase dokumen pelayanan kepada masyarakat terselesaikan	Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Subkegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Subkegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Persentase dokumen pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada camat yang tersedia	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang tersusun	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
				Persentase kehadiran lembaga peserta musrenbang desa dan musrenbang kecamatan	Jumlah dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakat	Subkegiatan Peningkatan Partisipasi	

https://jdih.pemalangkab.go.id

					an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Subkegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum		Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				Persentase laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Persentase perda dan perbup yang dikoordinasikan penegakkannya	Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan	Subkegiatan Koordinasi/Sin	

https://jdih.pemalangkab.go.id

					Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	ergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama		Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
				Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Subkegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Subkegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
					Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Subkegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Subkegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa		Persentase kesesuaian RKPDes dan RPJMDes dengan RPJMD	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan	Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Subkegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Subkegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Subkegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

						Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.2. Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Pendanaan

Dalam mendukung visi dan misi Bupati telah disusun program, kegiatan,subkegiatan dan pendanaan Kecamatan Randudongkal selama tahun 2026 sampai dengan 2030, seperti yang tecantum pada tabel berikut :

Tabel 4.2.
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Kecamatan Randudongkal

No	Tujuan	Sasaran	Outcome/ Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
								2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan				Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan	Angka	3	7		9		11		13		15		
		Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat			Nilai SKM	Nilai	93,37	94,50		94,50		94,50		95,50		95,50		
					Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri	%	16,67	16,67		16,67		16,67		16,67		16,67		

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Tujuan	Sasaran	Outcome/ Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
								2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	60,40	68,25	3.380.812.000	70,60	3.380.812.000	74,90	3.380.812.000	78,50	3.380.812.000	3.380.812.000	3.380.812.000	
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dok	15	15	2.626.000	15	2.626.000	15	2.626.000	15	2.626.000	15	2.626.000	
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	3	3	3.100.000	3	3.100.000	3	3.100.000	3	3.100.000	3	3.100.000	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	1	1	2.905.000	1	2.905.000	1	2.905.000	1	2.905.000	1	2.905.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
								2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	

https://jdih.pemalangkab.go.id

				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	1	1	2.940.000	1	2.940.000	1	2.940.000	1	2.940.000	1	2.940.000	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok	1	1	2.646.000	1	2.646.000	1	2.646.000	1	2.646.000	1	2.646.000	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok	1	1	2.945.000	1	2.945.000	1	2.945.000	1	2.945.000	1	2.945.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
								2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap	4	4	4.800.000	4	4.800.000	4	4.800.000	4	4.800.000	4	4.800.000	
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	4	4	3.300.000	4	3.300.000	4	3.300.000	4	3.300.000	4	3.300.000	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun	Dok	73	73	2.501.022.000	73	2.501.022.000	73	2.501.022.000	73	2.501.022.000	73	2.501.022.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	15	17	2.494.092.000	17	2.494.092.000	17	2.494.092.000	17	2.494.092.000	17	2.494.092.000	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap	1	1	2.300.000	1	2.300.000	1	2.300.000	1	2.300.000	1	2.300.000	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Lap	11	11	3.100.000	11	3.100.000	11	3.100.000	11	3.100.000	11	3.100.000	
				Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosi	Dok	1	1	1.530.000	1	1.530.000	1	1.530.000	1	1.530.000	1	1.530.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

				Prognosis Realisasi Anggaran	s Realisasi Anggaran												
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun	Dok	2	2	5.855.000	2	5.855.000	2	5.855.000	2	5.855.000	2	5.855.000	
				Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dok	1	1	4.135.000	1	4.135.000	1	4.135.000	1	4.135.000	1	4.135.000	
				Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lap	1	1	1.720.000	1	1.720.000	1	1.720.000	1	1.720.000	1	1.720.000	
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas	Orang	20	20	580.400	20	5.600.000	20	580.400	20	580.400	20	580.400	

https://jdih.pemalangkab.go.id

				Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20	20	580.400	20	5.600.000	20	580.400	20	580.400	20	580.400	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Paket	23	23	132.096.100	23	132.096.100	23	113.982.310	23	113.982.310	23	113.982.310	
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	11.920.000	1	18.525.000	1	18.525.000	1	18.525.000	1	18.525.000	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	6.500.000	1	15.826.540	1	15.826.540	1	15.826.540	1	15.826.540	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah	Jumlah Paket Peralatan Rumah	Paket	1	1	53.205.500	1	5.596.570	1	5.596.570	1	5.596.570	1	5.596.570	

https://jdih.pemalangkab.go.id

				Tangga	Tangga yang Disediakan													
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	18.710.000	5	25.984.200	5	25.984.200	5	25.984.200	5	25.984.200	
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	4.200.000	1	2.750.000	1	2.750.000	1	2.750.000	1	2.750.000	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	2	23.380.600	2	45.300.000	2	45.300.000	2	45.300.000	2	45.300.000	
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit	73	20	0	20	53.855.000	20	53.855.000	20	53.855.000	20	53.855.000	
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	71	10	0	10	23.700.000	10	23.700.000	10	23.700.000	10	23.700.000	
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	2	10	0	10	30.155.000	10	30.155.000	10	30.155.000	10	30.155.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

					yang Disediakan												
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Laporan	36	36	198.920.000	36	240.556.600	36	240.556.600	36	240.556.600	36	240.556.600	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	2.000.000	12	8.284.600	12	8.284.600	12	8.284.600	12	8.284.600	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	41.700.000	12	27.366.000	12	27.366.000	12	27.366.000	12	27.366.000	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	155.220.000	12	204.906.000	12	204.906.000	12	204.906.000	12	204.906.000	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah barang milik daerah yang terpeliha	Unit	134	134	132.196.500	134	190.369.000	134	190.369.000	134	190.369.000	134	190.369.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

				Urusan Pemerintahan Daerah	ra													

No	Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Ket
								2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	10	24.310.000	10	122.600.000	10	122.600.000	10	122.600.000	10	122.600.000	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	90	90	12.150.000	90	5.100.000	90	5.100.000	90	5.100.000	90	5.100.000	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	26	26	10.220.000	26	24.240.000	26	24.240.000	26	24.240.000	26	24.240.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipeliharaa/Direhabilitasi	Unit	6	6	85.516.500	6	25.981.000	6	25.981.000	6	25.981.000	6	25.981.000	

No	Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
								2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipeliharaa/direhabilitasi	Unit	3	3	8.408.000	3	8.408.000	3	8.408.000	3	8.408.000	3	8.408.000	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipeliharaa/direhabilitasi	Unit	1	1	4.040.000	1	4.040.000	1	4.040.000	1	4.040.000	1	4.040.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persesntasepelimpahankewenangankekecamatan yang dilaksanakanseti aptahun	%	92,22	92,22	595.240	92,22	595.240	92,22	595.240	92,22	595.240	92,22	595.240	
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jenis data pemerintah yang dipublikasi	Dok	1	1	85.440	1	85.440	1	85.440	1	85.440	1	85.440	

No	Tujuan	Sasaran	Outcome / Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
								2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dok	1	1	85.440	1	85.440	1	85.440	1	85.440	1	85.440	

https://jdih.pemalangkab.go.id

				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun	Dok	2	2	256.320	2	256.320	2	256.320	2	256.320	2	256.320	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dok	1	1	85.440	1	85.440	1	85.440	1	85.440	1	85.440	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dok	1	1	85.440	1	85.440	1	85.440	1	85.440	1	85.440	
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang	Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan	Dok	4	4	256.320	4	256.320	4	256.320	4	256.320	4	256.320	

https://jdih.pemalangkab.go.id

				tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun															
				Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	2	85.440	2	85.440	2	85.440	2	85.440	2	85.440		
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	85.440	1	85.440	1	85.440	1	85.440	1	85.440		
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerinta	Jumlah laporan pelaksanaan	Laporan	17	17	253.480	17	253.480	17	253.480	17	253.480	17	253.480		

https://jdih.pemalangkab.go.id

				han yang Dilimpahkan kepada Camat	urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang tersusun														
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	17	17	253.480	17	253.480	17	253.480	17	253.480	17	253.480		
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kelembagaan desa dan keluraha n yang aktif	%	94,12	95,12	29.718.720	96,12	29.718.720	97,12	29.718.720	98,12	29.718.720	99,12	29.718.720		
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Dok	3	3	27.168.720	3	27.168.720	3	27.168.720	3	27.168.720	3	27.168.720		
				Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pemban	Lembaga Kemasyarakatan	1	1	200.880	1	200.880	1	200.880	1	200.880	1	200.880		

https://jdih.pemalangkab.go.id

				Desa	gunan di Desa												
				Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dok	1	1	24.417.840	1	24.417.840	1	24.417.840	1	24.417.840	1	24.417.840	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	2.550.000	1	2.550.000	1	2.550.000	1	2.550.000	1	2.550.000	
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi	Lembaga	1	1	2.550.000	1	2.550.000	1	2.550.000	1	2.550.000	1	2.550.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	1	1	2.550.000	1	2.550.000	1	2.550.000	1	2.550.000	1	2.550.000	
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanggulangan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	%	100	100	8.600.000	100	8.600.000	100	8.600.000	100	8.600.000	100	8.600.000	
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun	Laporan	4	4	6.050.000	4	6.050.000	4	6.050.000	4	6.050.000	4	6.050.000	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4	6.050.000	4	6.050.000	4	6.050.000	4	6.050.000	4	6.050.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

				Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Laporan	1	1	2.550.000	1	2.550.000	1	2.550.000	1	2.550.000	1	2.550.000	
				Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	1	1	2.550.000	1	2.550.000	1	2.550.000	1	2.550.000	1	2.550.000	
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	%	100	100	18.777.640	100	18.777.640	100	18.777.640	100	18.777.640	100	18.777.640	
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Orang	1250	641	18.777.640	641	18.777.640	641	18.777.640	641	18.777.640	641	18.777.640	
				Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Orang	1.200	591	14.625.000	591	14.625.000	591	14.625.000	591	14.625.000	591	14.625.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

				dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia												
				Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	50	50	2.555.440	50	2.555.440	50	2.555.440	50	2.555.440	50	2.555.440	
				Sub Kegiatan Penangana	Jumlah Laporan Konflik	Laporan	4	4	170.880	4	170.880	4	170.880	4	170.880	4	170.880	

https://jdih.pemalangkab.go.id

				n Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan												
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dok	3	3	1.426.320	3	1.426.320	3	1.426.320	3	1.426.320	3	1.426.320	
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kesesuaian RKPDes dengan RPJMDes	%	94,12	95,12	6.030.860	96,12	6.030.860	97,12	6.030.860	98,12	6.030.860	99,12	6.030.860	
				Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun	Dok	95	123	6.030.860	123	6.030.860	123	6.030.860	123	6.030.860	123	6.030.860	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam	Dok	17	17	110.880	17	110.880	17	110.880	17	110.880	17	110.880	

https://jdih.pemalangkab.go.id

				Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa												
				Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dok	17	17	140.880	17	140.880	17	140.880	17	140.880	17	140.880	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dok	17	17	140.880	17	140.880	17	140.880	17	140.880	17	140.880	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dok	17	17	200.880	17	200.880	17	200.880	17	200.880	17	200.880	
				Sub Kegiatan	Jumlah Dokume	Dok	17	17	111.200	17	111.200	17	111.200	17	111.200	17	111.200	

https://jdih.pemalangkab.go.id

				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	n Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa												
				Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dok	10	10	115.440	10	115.440	10	115.440	10	115.440	10	115.440	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dok	17	17	111.300	17	111.300	17	111.300	17	111.300	17	111.300	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dok	17	17	111.080	17	111.080	17	111.080	17	111.080	17	111.080	

https://jdih.pemalangkab.go.id

				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dok	17	1	4.988.320	1	4.988.320	1	4.988.320	1	4.988.320	1	4.988.320	

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.3. Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Pada tabel berikut Kecamatan Randudongkal telah menyusun daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah.

Tabel 4.3.
Daftar Subkegiatan Prioritas Kecamatan Randudongkal
dalamMendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		
			Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
			Subkegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
			Subkegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
			Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		
			Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
			Subkegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
			Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum		
			Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan PeraturanKepala Daerah	
			Subkegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum		
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Subkegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			Subkegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) WawasanKebangsaan dan Ketahanan Nasional	
			Subkegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
			Subkegiatan PelaksanaanTugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa		
			Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
			Subkegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
			Subkegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
			Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
			Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan periode Tahun 2025-2029 untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pemalang yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029. Sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian dan Renstra PD Kabupaten Pemalang yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan di Kabupaten Pemalang.

Langkah strategis yang menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Kecamatan Randudongkal menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Randudongkal, oleh karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman bersama dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Randudongkal serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Pemalang. Dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Randudongkal merupakan solusi yang tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan atau target kinerja sasaran Kecamatan Randudongkal. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Randudongkal harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LkjIP) Kecamatan Randudongkal. Laporan Kinerja itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Kecamatan Randudongkal di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Randudongkal ini.

Randudongkal,

CAMAT RANDUDONGKAL

SLAMET EDY RIYANTO,SE MM
Pembina
NIP. 19720710 199403 1 008

https://djh.pemalangkab.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasar pasal 221 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Dengan terlayaninya berbagai kebutuhan administrasi masyarakat diharapkan dapat memperlancar berbagai urusan masyarakat. Kecamatan juga melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sehingga pemerintahan desa dapat lebih optimal dalam memajukan desanya dan mensejahterakan masyarakatnya. Agar tujuan tersebut dapat tercapai harus didukung oleh perencanaan yang baik sehingga perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

Kecamatan Warungpring sebagai salah satu PD harus menyusun Renstra. Penyusunan Renstra Kecamatan Warungpring sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029. Penyusunan Renstra Kecamatan Warungpring disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kementerian dan Renstra PD Kabupaten Pemalang yang terkait.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Warungpring Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Warungpring untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029.

Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 - 2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Warungpring serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029. Renstra menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Warungpring selama kurun waktu Tahun 2025 - 2029 dan merupakan tolak ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan pelayanan publik yang baik dan mewujudkan masyarakat desa yang aktif.

Penyusunan Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 - 2029 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Kecamatan Warungpring, dimana kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Warungpring harus mendukung kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kabupaten Pemalang sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai.

Proses penyusunan Renstra meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1) Persiapan Penyusunan Renstra PD, terdiri dari pembentukan tim penyusun Renstra PD, orientasi mengenai Renstra PD, agenda kerja tim penyusun Renstra PD, penyiapan data dan informasi; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD; (3) Penyusunan Rancangan Renstra PD; (4) Forum Perangkat Daerah; (5) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD; dan (6) Penetapan Renstra PD.

Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 - 2029 disajikan dalam bagan berikut

Gambar 1.1
Bagan Alur Penyusunan Renstra

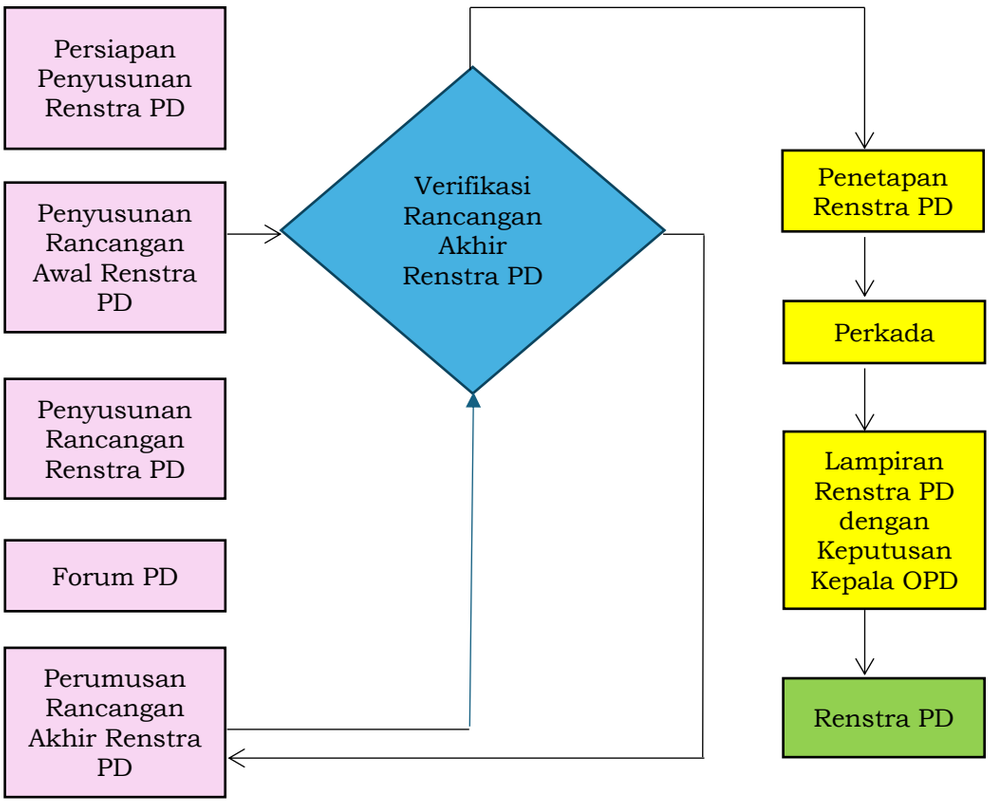

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah)

Dokumen Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 - 2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang. Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Gambar 1.2
Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

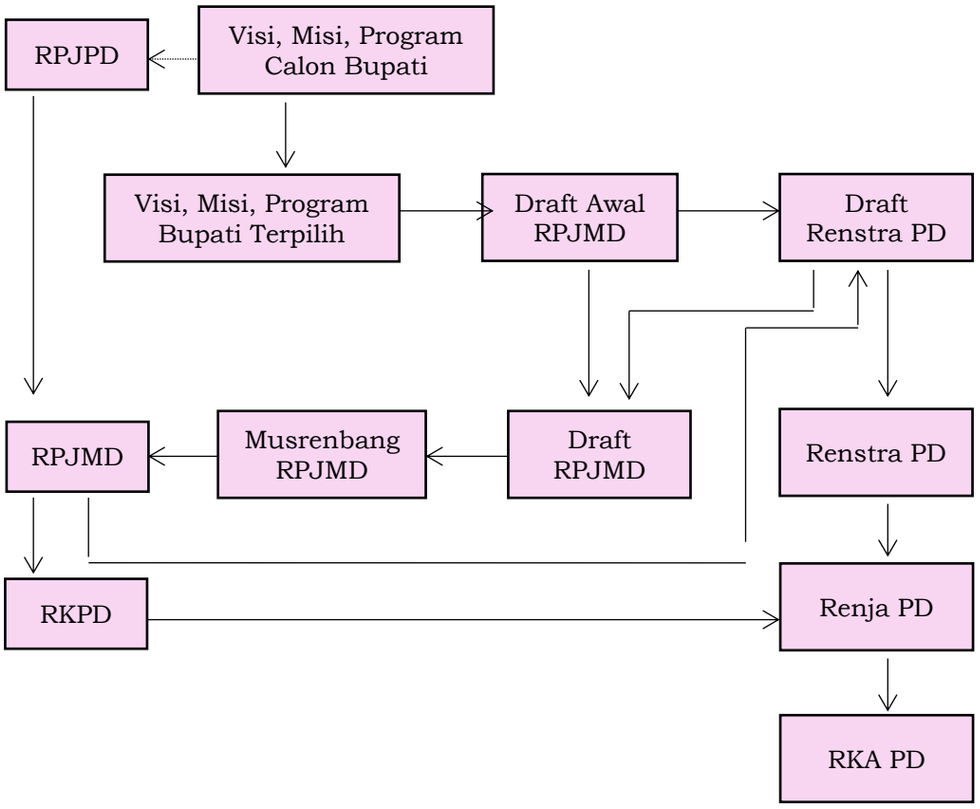

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 - 2029, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

https://jdih.pemalangkab.go.id

diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor15,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6206);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor xxx);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendaliandan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan DaerahTentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahdan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, SertaTataCara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

https://jdih.pemalangkab.go.id

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentangPenerapanStandarPelayanan Minimal (SPM)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah;
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten PemalangTahun 2008 Nomor23);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten PemalangTahun 2013 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor ..... Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor.....;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor .... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029 (LembaranDaerah Kabupaten PemalangTahun 2025Nomor....,TambahanLembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor ....);
34. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.
35. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
36. Peraturan Bupati Pemalang Nomor ..... Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas,FungsidanTataKerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
37. Peraturan Bupati Pemalang Nomor ..... Tahun 2025 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang;
38. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

https://jdih.pemalangkab.go.id

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud.

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah melalui peningkatan pelayanan kecamatan yang prima.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Warungpring untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah di Unsur Kewilayahan;
2. Menjadi ajuan kerja resmi bagi Kecamatan Warungpring serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Unsur Kewilayahan;
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Kecamatan Warungpring.

1.3.2. Tujuan

1. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja pada Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang seusai dengan tugas dan fungsinya, termasuk dalam pencapaian tujuan dan sasaran PD.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang setiap tahunnya.
3. Sebagai dasar dalam melakukian monitoring dan evaluasi kinerja Keccamatan Warungpring Kabuapten Pemalang Tahun 2025-2029

1.3. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen RenstraKecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu-isu Strategis Kecamatan Warungpring berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Warungpring, sumber daya Kecamatan Warungpring, kinerja pelayanan Kecamatan Warungpring, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Warungpring, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra PD provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, penentuan isu-isu strategis pada Kecamatan Warungpring.
3. Bab III Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan, berisi strategi dan arah kebijakan Kecamatan Warungpringdalam 5(lima) tahun mendatang
4. Bab IV Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan berisi berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan.
5. Bab V Penutup, berisi kaidah pelaksanaan dan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra Kecamatan Warungpring

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Warungpring

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Warungpring

Kecamatan Warungpring dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati PemalangNomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Warungpring mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Warungpring

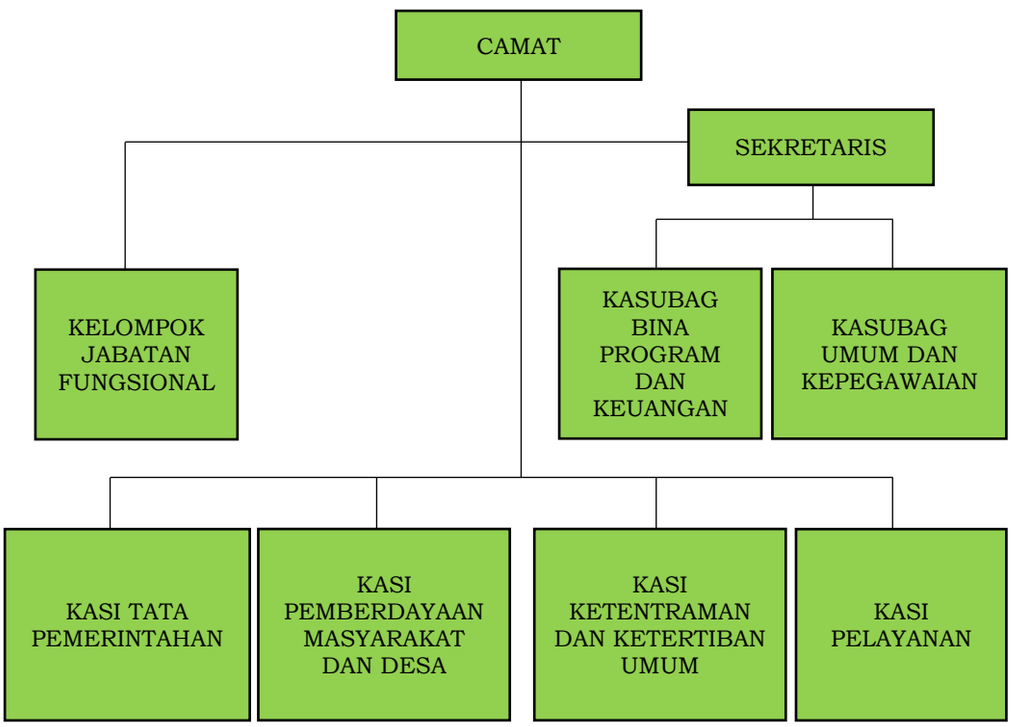

Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh

https://jdih.pemalangkab.go.id

Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

A. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Camat mempunyai uraian tugas :

1. Mengarahkan penyusunan dokumen perencanaan kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan organisasi, perencanaan partisipatif dan perencanaan yang lebih tinggi dan ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Merumuskan kebijakan kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Merumuskan inovasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
4. Mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan kecamatan, meliputi kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan umum dan kesekretariatan sesuai dengan tugas fungsi dan pedoman pelaksanaan agar tepat sasaran dan tujuan;
5. Mengarahkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan dengan melalui bimbingan, supervisi, fasilitasi dan evaluasi guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan;
6. Mengarahkan penyediaan dan pelayaan informasi publik serta penyusunan data dan informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
7. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsinya guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh PD kabupaten yang ada di kecamatan sesuai dengan petunjuk pimpinan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
9. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan Peraturan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
10. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Merumuskan laporan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kerja organisasi.

B. Sekretaris Camat

https://jdih.pemalangkab.go.id

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan kesekretariatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian sesuai dengan kebituhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
5. Mengoordinasikan penyusunan kondep inovasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
9. Melaksanakan tugas dan kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

   a. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

      Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :

      1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
      2. Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
      3. Menyusun konsep dokumen perencanaan Kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan oprganisasi, perencanaan partisipatif, dan perencanaanyang lebih tinggi guna dirumuskan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
      4. Menyusun konsep laporan capaian kinerja Kecamatan yang meliputi LkjIP, laporan pelaksanaan APBD dan laporan kinerja lain berdasarkan Renja dan realisasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban;
      5. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib adminstrasi;
      6. Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan keuangan;

https://jdih.pemalangkab.go.id

7. Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi LRA, LO, LPE, neraca dan CaLK serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;
8. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
10. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kecamata sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepasa pimpinan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai sengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengelola kegiatan administrasi surat menyurat, kepegawaian, penataan arsip, dokumentas, dan kearsipan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
4. Mengelola kegiatan kerumahtanggaan meliputi penyediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, pelayanan tamu dinas dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Mengelola administrasi barang milik daerah yang meliputi penyusunan analisa kebutuhan dan pemeliharaan barang, penatausahaan barang, dan penyusunan administrasi barang lainnya sesuai dengan peraturan pengelolaan barang milik daerah guna tertib administrasi;
6. Mengelola kegiatan ketatalaksanaan meliputi penyusunan standart dan prosedur kerja sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Mengelola kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi penyediaan dan pelayanan informasi publik, penyusunan data informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian, pengaturan tata tempat dan tata acara serta kegiatan kehumasan dan keprotokolan lain sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;

https://jdih.pemalangkab.go.id

9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

C. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta, dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan memeriksa berkas yang diajukan kepala desa sebagai bahan konsultasi kepada pimpinan guna disahkan oleh pimpinan;
5. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan melalui fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, fasilitasi pemberian tunjangan perangkat desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;
6. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Seksi Tata Pemerintahan meliputi data monografi desa, data perangkat desa dan data terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
8. Menyusun konsep motivasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

D. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas :

https://jdih.pemalangkab.go.id

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, keagamaan, pembinaan kesehatan, keluarga berencana, organisasi perempuan, pendidikan, pemuda dan olahraga dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan sosial desa melalui fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pembangunan desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjaama desa dengan pihak ketiga, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, koordinasi pendampingan desa, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial guna tertib administrasi dan kelancaran dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dengan melibatkan stakeholder terkait demi tercapainya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran;
6. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan dan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawabkan kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

E. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan meliputi fasilitasi pengaduan masyarakat, kejadian musibag, bencana umum atau kejadian luar biasa lainnya serta upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lainnya dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan pemuka agama/tokoh masyarakat serta pihak terkait

https://jdih.pemalangkab.go.id

lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum;

4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau desa/kelurahan serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna tegaknya peraturan;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah yang ada di wilayah kecamatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dan/atau swasta dan/atau pihak terkait lainnya sesuai dengan prosesur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keamanan dan terpeliharanya prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah;
6. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan yang bergerak di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
7. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kebutuhan informasi publik;
9. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

F. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan kegiatan koordinasi terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan dan kabupaten, pemerintah desa/kelurahan, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep rencana operasional dan standar pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
5. Melaksanakan kegiatan fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan di bidang perizinan, non perizinan, administrasi pertanahan dan pelayanan administrasi lainnya sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dan pemeriksaan dokumen/berkas permohonan, cek lokasi apabila disyaratkan, pengesahan hingga penyampaian kembali dokumen/berkas kepada pemohon guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;

https://jdih.pemalangkab.go.id

6. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan prosedur dan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
7. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tercapainya kepuasan masyarakat;
8. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undanganguna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
9. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
10. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah;

Sumber daya Kecamatan Warungpring sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

a. Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Jumlah pegawai di Kecamatan Warungpring dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyakatan sosial tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.
Pegawai Kecamatan Warungpring

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Golongan				Jumlah
				I	II	III	IV	
1	Camat		1				1	1
2	Sekcam	1				1		1
3	Kasubag	2				2		2
4	Kasi Kecamatan	4				4		4
5	JFU Kecamatan	6	5		4	7		11
6	JFT Kecamatan							
7	Non ASN Kecamatan	4	2					6
Jumlah		17	7		4	14	1	25

Sumber : Sekretariat Kecamatan Warungpring , 2025

Pegawai Kecamatan Warungpring berjumlah 25 orang, meliputi 17 orang laki-laki dan 7 orang perempuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Warungpring dominan laki-laki yaitu sebanyak 68 %. Agar Kecamatan Warungpring menerapkan responsif gender, untuk perekrutan tenaga non ASN selanjutnya disarankan berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya jumlah pegawai berdasar golongan, meliputi non ASN sebanyak 6 orang,golongan II sebanyak 4 orang, golongan III sebanyak 14 orang dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

golongan IV sebanyak 1 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Warungpring dominan bergolongan III yaitu sebanyak 56 %.

Tabel 2.2.
Data Pegawai Berdasar Diklat Kepemimpinan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Diklatpim III			
2	Diklatpim IV			
3	ADUM			
4	SEPADA			
5	Struktural yang belum diklat	7	6	1
Jumlah				

Sumber : Sekretariat Kecamatan Warungpring ., 2025

Jumlah pegawai berdasarkan diklat kepemimpinan pada Kecamatan Warungpring, belum ada yang mengikuti orang belum mengikuti diklat kepemimpinan,hal ini disebabkan masih menunggu penyelenggaraan diklat dari instansi yang berwenang.

Tabel 2.3.
Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pasca Sarjana (S2)	2	1	1
2	Sarjana (S1)	12	8	4
3	Diploma	1	1	
4	SLTA	8	4	4
5	SLTP	1	1	
6	SD	1	1	
Jumlah		25	16	9

Sumber : Sekretariat Kecamatan Warungpring , 2025

Jumlah pegawai Kecamatan Warungpring berdasar tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S2) sebanyak 2 orang, Sarjana (S1) sebanyak 12 orang, Diploma sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 7 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara kualitas SDM di Kecamatan Warungpring cukup masih perlu ditingkatkan karena pegawai di Kecamatan Warungpring dominan berpendidikan S1 yaitu sebanyak 40 %.

Tabel 2.4.
Data Pegawai Berdasar Tingkat Eselon

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	IIIA	1	1	
2	IIIB	1		1
3	IVA	4	4	
4	IVB	2	2	
Jumlah		8	5	1

Sumber : Sekretariat Kecamatan Warungpring ., 2025

Jumlah pegawai Kecamatan Warungpring berdasarkan tingkat eselon, yaitu Eselon IIIA sebanyak1 orang, Eselon IIIB sebanyak 1 orang, Eselon IVA sebanyak 4 orang, Eselon IVB sebanyak 2 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Kecamatan Warungpring berdasarkan tingkat eselon dominan esselon IVA yaitu sebanyak 40%.

A. Sarana Prasarana

Tabel 2.5.
Data Aset Kecamatan Warungpring

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Jumlah Harga (Rp)
					Baik	Sedang	Rusak	
1	01		Tanah					
		01	Tanah	1	1			222.500.000,00
			Jumlah KIB A					
2	01		Peralatan dan Mesin					
		02	Alat-alat Besar	1		1		9.988.000,00
		03	Alat-alat Angkutan	11	8	3		503.015.438,00
		04	Alat Bengkel dan Alat Ukur					75.000,00
		05	Alat Pertanian					
		06	Alat Kantor & Rumah Tangga	427		322	105	407.195.602,00
		07	Alat Studia & Alat Komunikasi	10		10		21.846.571,00
		08	Alat-alat Kedokteran					
		09	Alat Laboratorium	30		30		2.119.500,00
		10	Alat-alat persenjataan/keamanan					
			Jumlah KIB B					
3	03		Gedung dan Bangunan					
		11	Bangunan Gedung	8		8		1.272.072.000,00
		12	Monumen					
			Jumlah KIB C					
4	04		Jalan, Irigasi dan Jaringan					
		13	Jalan & Jembatan					
		14	Bangunan Air/Irigasi					
		15	Instalasi					
		16	Jaringan	3		3		3.450.000,00
			Jumlah KIB D					
5	05		Aset Tetap Lainnya					
		17	Buku dan Perpustakaan					
		18	Barang Bercorak Kebudayaan	5		5		98.000,00
		19	Hewan, Ternak dan Tanaman					
			Jumlah KIB E					
6	06		Konstruksi dalam Pengerjaan					
			Jumlah KIB F					
			Jumlah Total					2.442.360.111,00

b. Administrasi Kewilayahan

Terdapat 6 desa/kelurahan di Kecamatan Warungpring dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.6.
Administrasi Kewilayahan Kecamatan Warungpring

No	Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT	Jumlah Perangkat Desa	Jumlah Linmas	Ket
1	Pakembaran	3	3	22	12	20	
2	Warungpring	6	6	65	18	72	
3	Karangdawa	3	3	6	12	12	
4	Datar	4	4	14	10	16	
5	Cibuyur	7	6	49	16	36	
6	Mereng	4	9	36	14	42	
Jumlah		27	27	192	82	198	

Sumber : Sekretariat Kecamatan Warungpring , 2025

Kecamatan Warungpring terdiri dari 6 desa, 192 RT dan 27 RW. Untuk menjaga ketentraman dan ketertiban wilayah, Kecamatan didukung oleh 198 personil Linmas.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Warungpring

Gambaran kinerja pelayanan Kecamatan Warungpring Tahun 2021 - 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.7 dan Tabel 2.8 berikut :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan	Nilai				Na	78	78	80	80	Na	78,95	83,75	83,83	83,36	Na	101,2	107,4	104,8	106,87
2	Cakupan Layanan Masyarakat	%				96	97	97	98	98	99,34	98,56	98,68	99,19	99,09	103,5	101,6	101,7	101	101
3	Persentase pelayanan publik yang tesedia	%				85,14	99,34	99,57	99,71	100	99,34	99,43	100	100	100	116,7	100	100,4	100,3	100
4	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%				70	76	76	84	84	70	76	76	77	77	100	100	100	91,67	91,67
5	Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	Bulan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
6	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	Bulan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
7	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%				20	40	60	80	100	20	40	60	80	100	100	100	100	100	100
9	Tersedianya dokumen perencanaan di tingkat SKPD	%				20	40	60	80	100	20	40	60	80	100	100	100	100	100	100
10	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	Bulan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Warungpring , 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.1.4. Kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan

Berdasarkan tabel 2.7. dapat diketahui pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Warungpring selama tahun 2021 - 2024 sebagai berikut :

1. Melebihi target, meliputi :
   - Persentase penyerapan anggaran (2021 – 2024)
   - Rata-rata persentase partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam musrenbangdesa (2021 , 2022 dan 2023)
   - Nilai SKM (2022 – 2024)

   Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :

   a. Komitmen dari semua pihak;
   b. Sarana dan prasarana yang memadai;
   c. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM;
   d. Komunikasi dan koordinasi yang intens antar instansi.

2. Memenuhi target, meliputi :
   - Rata-rata persentase partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam musrenbangdesa (2021 dan 2024)
   - Persentase kelengkapan administrasi desa binaan (2021 – 2024)
   - Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan (2021 – 2024)
   - Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan (2021 – 2024)
   - Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia (2021 – 2024)
   - Tersedianya dokumen perencanaan di tingkat SKPD (2021 – 2024)
   - Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan (2021 – 2024)

   Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :

   a. Komitmen dari semua pihak;
   b. Sarana dan prasarana yang memadai;
   c. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM;
   d. Komunikasi dan koordinasi yang intens antar instansi

3. Tidak memenuhi target, meliputi :
   - Persentase kelengkapan administrasi desa binaan (2023 – 2024), yang disebabkan oleh : (1) Masih ada beberapa desa yang kurang memahami tentang pembuatan kelengkapan administrasi desa; (2) Masih kurangnya SDM yang memadai; dan (3) Pembinaan yang kurang terjadwal.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.8.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang
Tahun 2024 Sesuai Bab II Ranwal RPJMD tahun 2025 – 2029

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase capaian PBB	%	81,13	82,87	81,85	78,18	78,18
2	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	%	100	100	100	100	100
3	Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	%	23	23	23	23	23
4	Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan Pembangunan	%	85	85	85	85	85
5	Persentase lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang dibina	%	72	72	72	72	72
6	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100
7	Persentase jalan kewenangan kelurahan kondisi baik	%	-	-	-	-	-
8	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	%	100	100	100	100	100
9	Jumlah potensi konflik	Kasus	0	0	0	0	0
10	Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik	%	50	50	66,67	66,67	66,67

Sumber : Kecamatan Warungpring , 2025

Persentase capaian PBB Kecamatan Warungpring selama kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung menurun yaitu sebesar 3,37% pada tahun 2021 menjadi sebesar 78,18% pada tahun 2024. Hal ini disebabkan adanya dobel SPPT sehingga perlu dilakukan perbaikan data.

Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani selama kurun waktu tahun 2020 - 2024 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada pengaduan masyarakat di kecamatan dapat ditangani dengan baik dan tepat waktu.

Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020 - 2024 cenderung stagnan, yaitu sebesar 23%. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya kendala yang terjadi di kecamatan, mulai dari kurang siapnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas serta kurangnya dukungan dari PD terkait.

Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2020 - 2024 cenderung stagnan, yaitu sebesar 85%. Hal ini

https://jdih.pemalangkab.go.id
menunjukkan bahwa ada kepedulian dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang diselenggarakan mulai dari tingkat desa sampai kecamatan.

Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD) yang dibina selama kurun waktu tahun 2020 - 2024 stagnan, yaitu sebesar 72%. LKD terdiri dari RW, PKK, karang taruna, Posyandu, LPMD/K dan RT.

Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi selama kurun waktu tahun 2020 - 2024 cenderung stagnan, yaitu sebesar 100%. LKD merupakan mitra kecamatan dalam pembangunan kecamatan sehingga perlu untuk difasilitasi kegiatannya.

Persentase jalan kewenangan kelurahan kondisi baik dalam kurun waktu tahun 2020 - 2024 tidak ada nilainya karena Kecamatan Warungpring tidak memiliki Kelurahan.

Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani selama kurun waktu tahun 2020 - 2024 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada gangguan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan dapat ditangani dengan baik.

Pada tahun 2020 - 2024tidak ada potensi konflik. Sehingga jumlah potensi konflik di Kecamatan Warungpring yaitu 0 kasus selama tahun 2020 – 2024.

Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik dalam kurun waktu tahun 2020 - 2024 cenderung meningkat, yaitu sebesar 50% pada tahun 2020 menjadi sebesar 66,67% pada tahun 2024. Meskipun meningkat capaian tersebut masih jauh dari target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya kendala yang terjadi di kecamatan, mulai dari kurang siapnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas .

Tabel 2.9.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Berdasarkan SDGs

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2	**NIHIL**					
3						

Sumber : Kecamatan Warungpring, 2025

2.1.1 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Warungpring

Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan meliputi seluruh warga masyarakat yang berada dalam wilayah Kecamatan Warungpring, termasuk :

1 Warga negara Indonesia yang memiliki KTP dan KK Wilayah Kecamatan Warungpring
2 Penduduk asing yang memilik izin tinggal di Wilayah Kecamatan Warungpring

https://jdih.pamekasankab.go.id

3 Organisasi Masyarakat (Ormas), Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha yang berdomisili di Wilayah Kecamatan Warungpring
4 Institusi pemerintahan di tingkat Kecamatan Warungpring seperti Kelurahan, RT, RW dan lembaga kemasyarakatan desa

2.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Warungpring

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Kecamatan Warungpring sebagai PD mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Warungpring dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.10.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Warungpring

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia	Masih terbatasnya jenis data pemerintahan yang dipublikasi	Masih terbatasnya data pemerintahan yang tersedia
		Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat	Masih terdapat pengajuan izin non usaha
			Masih terdapat ketidaksesuaian data masyarakat miskin
			Masih terdapat kewenangan lain yang dilimpahkan
2	Belum optimalnya desa bertata kelola pemerintahan baik	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Masih banyak desa yang belum mampu melaksanakan administrasi tata pemerintahan desa dengan tertib
			Belum optimalnya pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa
			Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
3	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja	Belum tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan PD
			Belum optimalnya penyusunan dokumen penganggaran PD
			Belum optimalnya penyusunan laporan evaluasi kinerja PD
		Belum optimalnya pengadministrasian keuangan	Perlunya penyediaan gaji dan tunjangan ASN setiap bulan
			Belum optimalnya penyusunan laporan keuangan PD
4	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Belum optimalnya pengadministrasian Barang Milik Daerah (BMD)	Belum optimalnya penyusunan perencanaan kebutuhan BMD
			Belum optimalnya penyusunan laporan BMD
		Masih rendahnya kapasitas SDM	Minimnya kegiatan peningkatan kapasitas
		Belum optimalnya penyediaan layanan administrasi umum	Belum tercukupinya sarana dan prasarana kantor yang dibutuhkan
			Penataan arsip belum sesuai ketentuan

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya penyediaan jasa penunjang untuk memperlancar pelaksanaan tugas	Masih kurangnya penyediaan jasa penunjang pelaksanaan tugas
			Jumlah ASN belum mencukupi kebutuhan
		Belum optimalnya pemeliharaan BMD	Terdapat kendaraan dinas yang harus dipelihara
			Terdapat mebel yang harus dipelihara
			Terdapat peralatan dan mesin yang harus dipelihara
			Terdapat gedung kantor yang harus dipelihara
			Terdapat sarpras pendukung gedung kantor yang harus dipelihara

2.3 Isu Strategis Kecamatan Warungpring

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berlangsung dalam jangka menengah / panjang (Permendagri 86 tahun 2017). Isu strategis Kecamatan Warungpring dirumuskan dengan mempertimbangkan isu strategis global, Nasional dan Provinsi dan memperhatikan potensi, peluang dan tantangan yang ada di Kecamatan Warungpring selama kurun waktu tahun 2025 – 2029. Isu strategis Global, Nasional dan Provisi Jawa Tengah dan Isu strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pemalang untuk Kecamatan Warungpring adalah sebagai berikut :

Tabel 2.11.
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pelayanan Publik	Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia		Krisis Lapangan Pekerjaan	Masih tingginya kesenjangan pembangunan antar wilayah karena persebaran pusat ekonomi yang tidak merata antara utara dan selatan, barat dan timur (Bali), serta daerah kepulauan	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Belum Optimalnya Pelayanan Publik di Kecamatan Warungpring
Pembinaan dan Pengawasan tata kelola Pemerintahan Desa	Belum optimalnya desa bertata kelola pemerintahan baik		Krisis Utang	Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya mismatch	Penurunan tingkat kemiskinan	Belum Optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Tata Kelola Pemerintah

https://jdih.pemalangkab.go.id

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri		an Desa
	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja		Hilangnya Keanekaragaman Hayati	Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan jumlah penduduk miskin serta scarring effect akibat pandemi COVID-19	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	

Setelah mempertimbangkan berbagai isu strategis global, Nasional, dan Provinsi Jawa Tengah, dan memperhatikan potensi, peluang dan tantangan yang ada di Kecamatan Warungpring, dirumuskan isu strategis Kecamatan Warungpring. Isu strategis Kecamatan Warungpring tahun 2025-2029 difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat, kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai berikut:

a. Pemerataan pembangunan infrastruktur
b. Penanggulangan risiko bencana
c. Sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkarakter
d. Reformasi tata kelola pemerintahan

3.1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Penelaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Warungpringyang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029 adalah :

“Terwujudnya PEMALANG BERCAHAYA - BERSIH CAKAP HANDAL, MULYA”

https://jdih.pemalangkab.go.id

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Bersih

Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan

Cakap

Cakap dimaknai memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.

Handal

Handal dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.

MULYA

Mulya: Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029, sebagai berikut :

1. Resik

   Menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih

2. Hijau
   Meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yg berkelanjutan
3. Apik
   Meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah
4. Peduli
   Meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat
5. Silaturahmi
   Meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong,tepa selira dan sejahtera
6. Organisatoris
   Meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi
7. Digitalisasi
   Memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar

https://jdih.pemalangkab.go.id

8. Ikhlas

Menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB III
TUJUAN,SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Kecamatan Warungpring dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang pelayanan publik, maka Kecamatan Warungpring harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Kecamatan Warungpring secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat secara umum.

3.1 Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Warungpring selama tahun 2025–2029 adalah "**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan. Kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan**". Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Warungpring sebagai PD yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dengan tujuan **Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan. Kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan**. Tujuan tersebut diukur dengan indikator jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan.

3.2 Sasaran

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Warungpring dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Warungpring selama tahun 2025-2029, adalah "**Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat**". Sasaran tersebut diukur dengan indikator :

1. Nilai SKM adalah Survei Kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan Warungpring semester I dan II pada tahun berjalan.Rumus Nilai SKM adalah = Total dari nilai persepsi per unsur x nilai penimbang
2. Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri dengan rumus jumlah desa mandiri dibagi jumlah seluruh desa di Kecamatan x 100%

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

Adapun teknik merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Warungpring dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Teknis Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Warungpring

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntable, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah desa / kelurahan mandiri di Kecamatan (Desa / Kelurahan)	2	2	3	4	5	6	
		Meningkatnnya kualitas Pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Nilai SKM (Nilai)	88,10	88,15	88,30	88,50	88,70	90,00	
			Prosentase meningkatnya jumlah Desa Mandiri (%)	33,3	33,3	50	66,7	83,3	100	

https://jdih.pemalangkab.go.id

3.3 Strategi

Strategi yang dilakukan Kecamatan Warungpring untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Kecamatan Warungpring Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM Kecamatan Warungpring

   Meningkatkan kualitas SDM Kecamatan Warungpring dengan cara sebagai berikut :

   a. Mengusulkan pegawai Kecamatan Warungpring ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang untuk mengikuti pelatihan, bimbingan teknis maupun sosialisasi yang dapat meningkatkan kompetensi pegawai Kecamatan Warungpring
   b. Mengadakan Pelatihan/Sosialisasi/ Bimbingan Teknis intern di Kecamatan Warungpring kepada Pegawai Kecamatan Warungpring
   c. Mengadakan pelatihan digitalisasi dalam pemberian layanan pemerintahan
2. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas
3. Meningkatnya kualitas pembangunan desa dan kawasan perdesaan
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hidup berdampingan secara harmonis dan kondusif
5. Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntable, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik

3.4 Arah Kebijakan

Penahapan pembangunan Kecamatan Warungpring adalah prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Warungpring, Penahapan Renstra Kecamatan Warungpring dapat disajikan pada tabel di bawah ini

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Kecamatan Warungpring

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Memperkuat digitalisasi dalam memberikan pelayanan pemerintahan	Meningkatkan infrastruktur di Desa (peningkatan infrastruktur jalan akses pertanian)	Penguatan Pemberdayaan Masyarakat melalui pelatihan ketrampilan untuk mendukung UMKM	Mempercepat pembangunan Kecamatan Warungpring untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat	Peningkatan Keamanan dan ketertiban umum

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategis yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kecamatan Warungpring Tahun 2025 – 2030 memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Warungpring adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Warungpring

NO	OPERASIONALISASI NPSK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN WARUNGPRING	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum	Peningkatan kualitas perencanaan daerah di fokuskan pada transparansi, akuntabilitas perencanaan, dan sinergitas dok pusat dan propinsi Peningkatan kualitas digitalisai pelayanan pemerintahan di fokuskan pada peningkatan tata kelola arsitektur SPBE, mendorong kualitas SMART City dan kualitas layanan aduan Peningkatan kualitas pelayanan publik di fokuskan pada pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan kepuasan pada masyarakat	Penguatan sistem perencanaan, pelayananan pemrintahan dan pengukuran kinerja	
2	Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Pengembangan industri kecil menengah dengan penguatan sentra/kluster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital	Pengembangan pelatihan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan UMKM	
3	Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan konduktivitas wilayah dengan peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama dan pemahaman wawasan kebangsaan	Meningkatkan pelatihan limas dan pembinaan masyarakat terkait dengan sistem pengaduan maupun keamanan dan ketertiban	
4	Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa di fokuskan pada peningkatan kualitas eprocurements, kualitas sarana dan prasarana	Penguatan koordinasi dan supervisi dar	
5	Membina dan Mengawasi penyelenggaraan	Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan difokuskan pada	Peningkatan pembinaan dan pengawasan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	OPERASIONALISASI NPSK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN WARUNGPRING	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	kegiatan desa dan / atau kelurahan	peningktan indeks desa, peningkatan peran BUMDes dalam pembangunan daerah, peningkatan pembinaan dan pengawasan kecamatan dalam pembangunan desa/kelurahan dan pengembangan kerjasama antar dan pengembangan kerjasama antar desa	penyelenggaraan kegiatan desa dan/kelurahan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Warungpring yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 - 2029 :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      g. Sub KegiatanEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
      d. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
   3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
      b. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

   4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
      b. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
      c. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
   5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
      g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
      h. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

https://jdih.pemalangkab.go.id

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
   c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   e. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   f. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
      a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
      a. Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
      b. Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
      c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
   3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
      a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
      b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
      c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
      a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
      b. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

https://jdih.pemalangkab.go.id

c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
   a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
   b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
      a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
   2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
      a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
      a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
      b. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
      c. Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
      d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

F. Program Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintahan Desa
   1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
      a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
      b. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
      c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
      d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
      e. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
      f. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
      g. Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
      h. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
      i. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
      j. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang

https://jdih.pemalangkab.go.id

akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Kecamatan Warungpring selama tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada Gambar 4.1.

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan Renstra PD

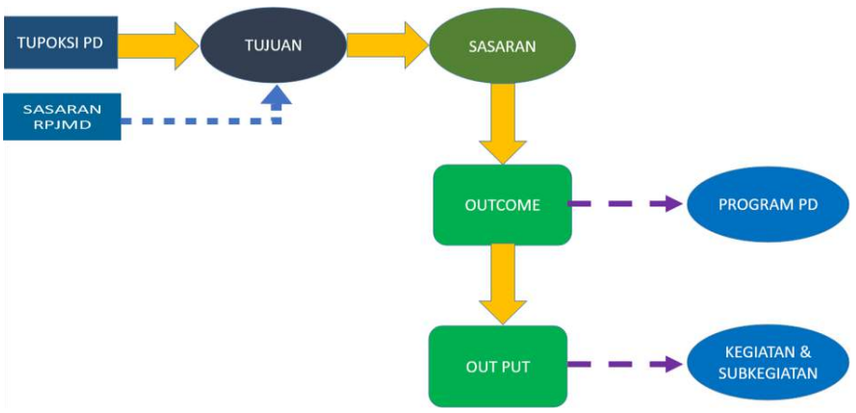

https://jdih.pemalangkab.go.id

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Warungpring menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanan Kecamatan Warungpring. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Kecamatan Warungpring serta teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Warungpring seperti Tabel berikut :

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Warungpring

Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Warungpring

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAB	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntable, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di Wilayah Kecamatan**				**Jumlah desa/kelurahan mandiri di kecamatan (Desa/Kelurahan)**		
		Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat			**Nilai SKM (Nilai)**		
					Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri (%)		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAB	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
			Meningkatnya kinerja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah		**Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai)**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
				Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan (%)	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (Dokumen)**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat	**Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan yang tersusun (Dokumen)**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAB	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				daerah yang akuntabel (%)			
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Persentase dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang akuntabel (%)	**Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang tersusun (Dokumen)**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	
						Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	
				Persentase administrasi kepegawaian yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	**Jumlah aktifitas administrasi kepegawaian yang terlaksana (Aktifitas)**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
						Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	
				Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	**Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersedia (Paket, Dokumen, Dan Laporan)**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAB	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	**Jumlah barang milik daerah yang tersedia (Unit)**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Persentase ketersediaan laporan penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	**Jumlah laporan penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia (Laporan)**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAB	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	**Jumlah barang milik daerah yang terpelihara (Unit)**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan Mebel	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan		**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAB	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
			pemerintahan dan pelayanan publik		**dilaksanakan setiap tahun (%)**		
				Persentase dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang menunjang pelaksanaan tugas (%)	**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (Dokumen)**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Persentase Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang menunjang pelaksanaan tugas (%)	**Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan yang tersusun (Laporan)**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	
						Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
						Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di Wilayah Kecamatan	
						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAB	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
						Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Persentase Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang menunjang pelaksanaan tugas (%)	**Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat (Laporan)**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang tersedia	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	
				Persentase jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang menunjang pelaksanaan tugas (%)	**Jumlah laporan koordinasi kegiatan Pemberdayaan desa yang tersusun (Laporan)**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	
						Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	
						Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAB	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
						oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan (%)	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi (Lembaga Kemasyarakatan)**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	
						Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
						Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum		**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	
				Persentase laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang menunjang pelaksanaan tugas (%)	**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun (Laporan)**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	
						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
						Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAB	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang menunjang pelaksanaan tugas (%)	**Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tersusun (Laporan)**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	
						Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama		**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	
				persentase Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang menunjang pelaksanaan tugas (%)	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Dokumen)**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	
						Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAB	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
						Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
						Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional	
						Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa		**Persentase kesesuaian RKPDes dan RPJMDes dengan RPJMD (%)**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	
				Persentase Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang menunjang pelaksanaan tugas (%)	**Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun (Dokumen)**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	
						Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
						Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAB	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
						Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
						Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
						Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
						Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
						Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
						Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
						Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Persentase Dokumen Penataan	**Jumlah Dokumen Penataan Organisasi**	**Penataan Organisasi**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAB	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Organisasi yang Menunjang Pelaksanaan Tugas (%)	**yang Tersusun (Dokumen)**		
						Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	

4.2 Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Warungpring
Kabupaten Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi di Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030					
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan	Desa	2	2		2		3		4		5		6				Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Nilai SKM	NILAI	88	88,01		88,10		88,15		88,30		88,50		88,70		90		Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
	Prosentase meningkatnya jumlah Desa Mandiri	%	30,3	30,3		30,3		50		66,7		88,3		100					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	60,04	61	3.058.998.000	61,15	3.260.814.000	61,30	3.260.814.000	61,50	3.260.814.000	61,75	3.260.814.000	62	3.260.814.000	62	3.260.814.000		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					18.261.200		22.399.500		18.261.200		18.261.200		18.261.200		18.261.200		18.261.200	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring

https://jdih.pemalangkab.go.id

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi di Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Keluaran kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	14	14		14		14		14		14		14		14			
Hasil Kegiatan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100	100		100		100		100		100		100		100			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	3	3	3.334.300	3	4.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000	18	6.000.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Dokumen	1	1	2.399.700	1	3.080.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	6	15.500.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring

https://jdih.pemalangkab.go.id

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi di Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun	Dokumen	1	1	2.170.800	1	2.785.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun	Dokumen	1	1	2.433.900	1	2.957.500	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang tersusun	Dokumen	1	1	2.025.800	1	3.156.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	Dokumen	1	4	3.565.800	4	3.013.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	4	4	2.330.900	4	2.908.000	4	2.908.000	4	2.908.000	4	2.908.000	4	2.908.000	4	2.908.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.641.853.000		2.495.666.000		2.495.666.000		2.495.666.000		2.495.666.000		2.495.666.000		2.495.666.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring

https://jdih.pemalangkab.go.id

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi di Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030					
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Keluaran Kegiatan	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	1	15		15		15		15		15		15		15			
Hasil Kegiatan	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	100	100		100	100	100		100		100		100		100			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang tersedia gaji dan tunjangan ASN	Orang/ bulan	17	16	2.489.410 .000	15	2.493.351 .000	17	2.089.609 .000	17	2.089.609 .000	17	2.089.609 .000	17	2.089.609 .000	102	12.537.645. 000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	Dokumen	1	1	1.976.000	1	2.315.000	1	1.976.000	1	1.976.000	1	1.976.000	1	1.976.000	6	1.976.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang tersusun	Dokumen			-			4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	24	3.000.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	Dokumen	2		-			2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	12	3.000.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring

https://jdih.pemalangkab.go.id

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi di Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					3.310.700		2.588.850											Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang tersusun	Dokumen	4	4		1		4		4		4		4		4			
Hasil Kegiatan	Persentase dokumen administrasi barang milik daerah yang sesuai ketentuan (%)	%	100	100		100		100		100		100		100		100			
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD (RKBU) yang tersusun	Dokumen	2	2	3.310.700	1	2.588.850	1	2.588.850	1	2.588.850	1	2.588.850	1	2.588.850	1	2.588.850	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang	Dokumen	2 dokumen	2	-			2		2		2		2				Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring

https://jdih.pemalangkab.go.id

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi di Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030					
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	tersusun																		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					1.963.100		2.974.600											Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Keluaran Kegiatan	Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas	Orang				35		20		16		16		16		16			
Hasil Kegiatan	Persentase pegawai yang meningkat kapasitasnya (%)	%				100		100		100		100		100		100			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibeli	Stel			-								11.500.000	23 stel		46	23.000.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang/ kegiatan			1.963.100	18	2.974.600	18	2.974.600	18	2.974.600	18	2.974.600	18	2.974.600	18	2.974.600	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek Implemen	Orang/ kegiatan			-			15/2	32.000.000	16/2	32.000.000	16/2	32.000.000	16/2	32.000.000	16/2	32.000.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring

https://jdih.pemalangkab.go.id

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi di Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	tasi Peraturan Perundang-undangan																		
Administrasi Umum Perangkat Daerah					124.337.200		164.291.750		164.291.750		164.291.750		164.291.750		164.291.750		164.291.750	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Keluaran Kegiatan	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Layanan		35		35		35		35		35		35		35			
Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%		100		100		100		100		100		100		100			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	jenis/bulan	4 / 12	4 / 12	5.388.500	4 / 12	5.496.750	4 / 12	5.496.750	4 / 12	5.496.750	4 / 12	5.496.750	4 / 12	5.496.750	4 / 12	5.496.750	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring

https://jdih.pemalangkab.go.id

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi di Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Unit	5		6.000.000	5	6.000.000	5	6.000.000	5	6.000.000	5	6.000.000	5	6.000.000	5	6.000.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Unit	12		13.212.000	12	10.295.000	12	10.295.000	12	10.295.000	12	10.295.000	12	10.295.000	12	10.295.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	paket	12	12	83.514.600	12	95.000.000	12	95.000.000	12	95.000.000	12	95.000.000	12	95.000.000	12	95.000.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang tersedia	paket	2/12	2/12	7.604.400	2/12	10.000.000	2/12	10.000.000	2/12	10.000.000	2/12	10.000.000	2/12	10.000.000	2/12	10.000.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
	Jumlah penggandaan yang tersedia	Lembar	12.000	12.000	-	12.000		12.000		12.000		12.000		12.000				Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	Jenis surat kabar yang tersedia jenis/bulan	jenis/bulan	2/12	2/12	-			2/12		2/12		2/12		2/12				Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang	Kegiatan	50	50	26.743.700	50	35.000.000	50	35.000.000	50	35.000.000	50	35.000.000	50	35.000.000	50	35.000.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring

https://jdih.pemalangkab.go.id

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi di Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030					
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	terfasilitasi																		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jenis Arsip Dinamis pada SKPD yang tertata	Jenis		12	2.500.000	12	2.500.000	12		12		12		12				Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					31.974.900		24.899.000											Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit		3		3		3		3		3		3		3			
Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100		100		100		100		100		100		100			
Pengadaan Kendaraan Peroranagan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	Unit	1	-	-			1		1		1		1					

https://jdih.pemalangkab.go.id

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi di Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang teredia	unit	16	7	-	7	15.000.000		15.000.000		15.000.000	5	15.000.000	3	15.000.000	17	15.000.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	unit	4	4	15.200.000	2	24.899.000	4	24.899.000	4	24.899.000	4	24.899.000	4	24.899.000	24	24.899.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang tersedia	unit	5 unit	5	16.774.900		0	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000		20.000.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang tersedia	unit			-		0	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000		90.000.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					128.946.200		140.157.000		140.157.000		140.157.000		140.157.000		140.157.000		140.157.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Keluaran Kegiatan	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jasa		39 laporan		39 laporan		39 laporan		39 laporan		39 laporan		39 laporan		39 laporan			

https://jdih.pemalangkab.go.id

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi di Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	yang tersedia																		
Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%		100		100		100		100		100		100		100			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	Surat	800	800	6.351.000	800	11.500.000	800	11.500.000	800	11.500.000	800	36.000.000	800	36.000.000	800	36.000.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan listrik yang dibayar tiap bulan	Jenis / Bulan	3/12	3/12	25.563.000	3/12	24.085.000	3/12	24.085.000	3/12	24.085.000	3/12	24.085.000	3/12	24.085.000	3/12	24.085.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis / Bulan	3/12	3/12	7.524.200	3/12	10.000.000	3/12	10.000.000	3/12	10.000.000	3/12	10.000.000	3/12	10.000.000	3/12	10.000.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring

https://jdih.pemalangkab.go.id

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi di Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030					
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	Orang/ bulan	6/12	6/12	94.572.000	6/12	94.572.000	6/12	94.572.000	6/12	94.572.000	6/12	94.572.000	7/12	94.572.000	35/72	94.572.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					56.331.100		106.142.500		106.142.500		106.142.500		106.142.500		106.142.500		106.142.500	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Unit	81	81		81		81		81		81		81		81			
Hasil Kegiatan	Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100		100		100		100		100		100		100			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara	Unit	11	11	38.569.000	13	63.760.000	12	63.760.000	12	63.760.000	13	63.760.000	14	63.760.000	74	63.760.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring

https://jdih.pemalangkab.go.id

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi di Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030					
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	Unit	40	50	7.500.000	100	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	300	15.000.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Unit	12	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	Unit	2	2	28.922.100	2	22.382.500	2	22.382.500	2	22.382.500	2	22.382.500	2	22.382.500		22.382.500	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	Unit			-			1		1		1		5				Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihar	Unit	5	5	-	5		5		5		5		5				Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring

https://jdih.pemalangkab.go.id

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi di Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030					
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	a																		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persesntase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	%	61,62	63,33	28.817.000	74,44	26.023.000	74,44	28.817.000	74,44	28.817.000	74,44	28.817.000	74,44	28.817.000	74,44	402.750	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1	2.562.600		3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000		3.000.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Keluaran Kegiatan	jenis data pemerintahan yang dipublikasikan	Data	12	12		12		12		12		12		12					
Hasil Kegiatan	Persentase data pemerintahan yang dipublikasi	%	40	60		60		80		80		100		100					
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jenis data pemerintahan yang tersedia	Data	3	6	2.562.600	12	3.000.000	6	3.000.000	6	3.000.000	6	3.000.000	6	3.000.000		3.000.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit				36	12.570.000	36	13.000.000	36	13.000.000	36	13.000.000	36	13.000.000	36	13.000.000	36	13.000.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring

https://jdih.pemalangkab.go.id

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi di Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030					
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan																			
Keluaran Kegiatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani	Kasus	3	3		12		3		3		3		3					
Hasil Kegiatan	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	100		100		100		100		100		100					
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah SOP pelayanan yang tersusun	Peraturan			4.749.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jenis pelayanan SPM yang terfasilitasi	Layanan			3.238.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang terlayani	Kasus	3	3	4.583.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring

https://jdih.pemalangkab.go.id

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi di Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					13.684.400		10.023.000		10.023.000		10.023.000		10.023.000		10.023.000		10.023.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Keluaran Kegiatan	Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	Kewenangan	7	7		7		7		7		7		7		7			
Hasil Kegiatan	Persentase pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	%	23	23		23,33		23		23		23		23		23			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah izin non usaha yang diterbitkan	Izin	20	20	9.223.600	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000		5.000.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan verval DTKS yang tersusun	Dokumen	1	12	4.460.800	12	5.023.000	12	5.023.000	12	5.023.000	12	5.023.000	12	5.023.000	12	5.023.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring

https://jdih.pemalangkab.go.id

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi di Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030					
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Jumlah surat non perizinan yang diterbitkan	Surat	210	210	-	210		210		210		210		210				Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan lain yang tersedia	Kewenangan			-			8	10.000.000	8	10.000.000	8	10.000.000	8	10.000.000	40	10.000.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	%	100	100	51.609.700	100	76.727.300	100	76.727.300	100	76.727.300	100	76.727.300	100	76.727.300	100	76.727.300	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah peserta Musrenbang (Desa/Kelurahan + Kecamatan)			13	51.609.700	13	76.727.300	13	76.727.300	13	76.727.300	13	76.727.300	13	76.727.300	13	76.727.300	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Keluaran Kegiatan	Jumlah peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Desa / Kel + Kec)	Orang	60	60		60		60		60		60							

https://jdih.pemalangkab.go.id

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi di Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030					
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Hasil Kegiatan	Persentase kehadiran Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Desa / Kel + Kec)	%	100	100		100		100		100		100							
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta sosialisasi Musrenbang Desa/Kelurahan	Lembaga	24	24	2.366.400	24	3.000.000	24	3.000.000	24	3.000.000	24	3.000.000	24	3.000.000	24	3.000.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Orang	60/1	60/1	28.811.900	150	35.000.000	60/1	35.000.000	60/1	35.000.000	60/1	35.000.000	60/1	35.000.000	360/1	210.000.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan hasil Musrenbangkab yang didampingi	Desa / Kelurahan	12	12	22.797.800	12	38.727.300	12	38.727.300	12	38.727.300	12	38.727.300	12	38.727.300	12	38.727.300	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					0													Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring

https://jdih.pemalangkab.go.id

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi di Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030					
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Keluaran Kegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang aktif	Lembaga	3	3				4		4		5		6					
Hasil Kegiatan	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang aktif	%	50	50				66,67		83,33		83,33		100					
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi	Lembaga	3	3	-	-	-	4		4		5		6				Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peserta peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Orang	40	40	-	-	-	40		40		40		40				Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	%	100	100	4.748.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring

https://jdih.pemalangkab.go.id

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi di Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				6	4.748.000	6	4.000.000	6	4.000.000	6	4.000.000	6	4.000.000	6	4.000.000	6	4.000.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Keluaran Kegiatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	Orang		60		60		60		60		60		60					
Hasil Kegiatan	Persentase peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	%		70				75		80		80		95					
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas	Orang		60	3.048.000	60	4.000.000	60	4.000.000	60	4.000.000	60	4.000.000	60	4.000.000	60	4.000.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan				4	1.700.000	4	2.425.500	4	2.425.500	4	2.425.500	4	2.425.500	4	2.425.500	4	2.425.500	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring

https://jdih.pemalangkab.go.id

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi di Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Kepala Daerah																			
Keluaran Kegiatan	Jumlah Perda dan Perkada yang dikoordinasikan penegakkannya	Peraturan	2			4			3		3		3		3				
Hasil Kegiatan	Persentase Perda dan Perkada yang dikoordinasikan penegakkannya	%	75				77		78		79		80		80				
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Perda dan Perbub yang dimonitoring	Peraturan	6	6	1.700.000	6	2.425.500	6	2.425.500	6	2.425.500	6	2.425.500	6	2.425.500	6	2.425.500	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	%	100	100	45.105.600	100	78.300.500	100	78.300.500	100	78.300.500	100	78.300.500	100	78.300.500	100	78.300.500	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring

https://jdih.pemalangkab.go.id

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi di Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala daerah	Dokumen		12	45.105.600	12	78.300.500	12	78.300.500	12	78.300.500	12	78.300.500	12	78.300.500	12	78.300.500	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Keluaran Kegiatan	Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Orang				650								80		80			
Hasil Kegiatan	Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	%		75		75		77,5		77,5		80							
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	Jumlah laporan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya	Kegiatan	2	2	31.695.600	2//400 org	60.000.000	2//400 org	60.000.000	2//400 org	60.000.000	2//400 org	60.000.000	2//400 org	60.000.000	2//400 org	60.000.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring

https://jdih.pemalangkab.go.id

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi di Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030					
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	yang dilaksanakan																		
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional tingkat desa	Orang		60	-	250		60		60		60		60				Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial tingkat desa dan kecamatan	Kasus		2	3.388.000	4	2.300.500	4	2.300.500	4	2.300.500	4	2.300.500	4	2.300.500	4	2.300.500	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah tema rapat koordinasi Forkompimcam	Tema	6	6	18.522.000	6	16.000.000	6	16.000.000	6	16.000.000	6	16.000.000	6	16.000.000	6	16.000.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase kesesuaian RKPDes dan	%	66,67	66,67	19.940.000	66,67	114.218.500	66,67	19.940.000	83,33	19.940.000	83,33	19.940.000	83,33	19.940.000	83,33	692.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring

https://jdih.pemalangkab.go.id

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi di Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030					
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
PEMERINTAHAN DESA	RPJMDes dengan RPJMD																		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					19.940.000		114.218.500											Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Keluaran Kegiatan	Jumlah desa bertata kelola pemerintahan baik	Desa	3	3		4		4		5		5		6		6			
Hasil Kegiatan	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan	%	50	50		66		66		83		83		100		100			
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Desa / Kegiatan	6/4	6/4	4.300.000	6/4	2.563.000	6/4	2.563.000	6/4	2.563.000	6/4	2.563.000	6/4	2.563.000	6/4	2.563.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring

https://jdih.pemalangkab.go.id

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi di Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030					
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina buku administrasi desa	Desa / Kegiatan	6/2	6/2	1.640.000	6/2	2.185.000	6/2	2.185.000	6/2	2.185.000	6/2	2.185.000	6/2	2.185.000	6/2	2.185.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Desa / Kegiatan	6/4	6/6	1.640.000	6/6	2.825.000	6/6	2.825.000	6/6	2.825.000	6/6	2.825.000	6/6	2.825.000	6/6	2.825.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Orang / Kegiatan	18/2	18/2	3.803.600	6	2.500.000	6	2.500.000	6	2.500.000	6	2.500.000	6	2.500.000	6	2.500.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah fasilitasi pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan	Desa	0	0	0	5	100.000.000	0	5.000,000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000		5.000.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Orang / Kegiatan		6	1.376.000	6	1.625.000	6	1.625.000	6	1.625.000	6	1.625.000	6	1.625.000	6	1.625.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring

https://jdih.pemalangkab.go.id

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi di Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan	Surat		4	3.412.200	6	1.020.000	6	1.020.000	6	1.020.000	6	1.020.000	6	1.020.000	6	1.020.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes)	Desa / Kegiatan	6/2	6/2	6.000.000	6/4	6.000.000	6/4	6.000.000	6/2	6.000.000	6/2	6.000.000	6/2	6.000.000	36/12	36.000.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa	Desa / Kegiatan	6/2	6/2	6.000.000	-		6/2	6.000.000	6/2	6.000.000	6/2	6.000.000	6/2	6.000.000	6/2	6.000.000	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan desa	Orang / Kegiatan	6	6	3.768.200	6	3.768.200	6	3.768.200	6	3.768.200	6	3.768.200	6	3.768.200	6	3.768.200	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kecamatan Warungpring sudah menerapkan penganggaran berbasis pengarusutamaan gender, pada kegiatan Musrenbang Kecamatan, dimana perwakilan kelompok perempuan menjadi salah satu komponen peserta. Pengarusutamaan gender diterapkan juga dalam fasilitasi lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yaitu fasilitasi kepada PKK dan Posyandu.

Selain menentukan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan, langkah selanjutnya yaitu menentukan target pencapaian indikator kinerja terkait SDGs, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang secara berturut – turut disajikan pada tabel di bawah ini. Namun karena Kecamatan Warungpring tidak memiliki keempat indikator tersebut, maka disampaikan Nihil sesuai tabel di bawah.

Tabel 4.3

Target Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang berdasarkan SDGs

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2	**NIHIL**							
3								
dst								

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.3 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4.3.1 Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada akhir tahun perencanaan. Berikut ini indikator kinerja Kecamatan Warungpring sebagai berikut:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan	Desa	2	2	3	3	4	5	6	
	Nilai SKM	Nilai	88,01	88,10	88,15	88,30	88,50	88,70	90,00	
	Prosentase meningkatnya jumlah Desa Mandiri	%	33,3	33,3	50	50	66,7	83,3	100	

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan periode Tahun 2025-2029 dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pemalang yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029. Sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian dan Renstra PD Kabupaten Pemalang yang terkaituntuk tercapainya sasaran pembangunan di Kabupaten Pemalang.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Kecamatan Warungpring ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Warungpring. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman bersama dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Warungpring serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Pemalang.Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Warungpring merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan dan atau target kinerja sasaran Kecamatan Warungpring. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Kecamatan Warungpring yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Warungpring harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LkjIP) Kecamatan Warungpring. Laporan Kinerja (LkjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Kecamatan Warungpring di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Warungpring ini.

Pemalang, Juli 2025
Camat Warungpring

VIVIEN WIDYASARI,S.STP., MM
Pembina Tk.I
NIP. 19770711 199703 2 005

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasar pasal 221 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Kecamatan membantu dalam pelayanan dokumen kependudukan, dan fasilitasi aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan. Melalui forum tersebut, masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya. Aspirasi yang disampaikan dan disepakati bersama selanjutnya diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Agar tujuan tersebut dapat tercapai harus didukung oleh perencanaan yang baik sehingga perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

Kecamatan Moga sebagai salah satu PD harus menyusun Renstra. Penyusunan Renstra Kecamatan Moga sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kecamatan Moga disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra PD Kabupaten Pemalang yang terkait.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Moga untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Moga serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 . Renstra menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Moga selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan pelayanan publik yang baik dan mewujudkan masyarakat desa/kelurahan yang berdaya.

Penyusunan Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Kecamatan Moga dimana kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Moga harus mendukung kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai.

Proses penyusunan Renstra meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1) Persiapan Penyusunan Renstra PD, terdiri dari pembentukan tim penyusun Renstra PD, orientasi mengenai Renstra PD, agenda kerja tim penyusun Renstra PD, penyiapan data dan informasi; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD; (3) Penyusunan Rancangan Renstra PD; (4) Forum Perangkat Daerah; (5) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD; dan (6) Penetapan Renstra PD.

Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 disajikan dalam bagan berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029

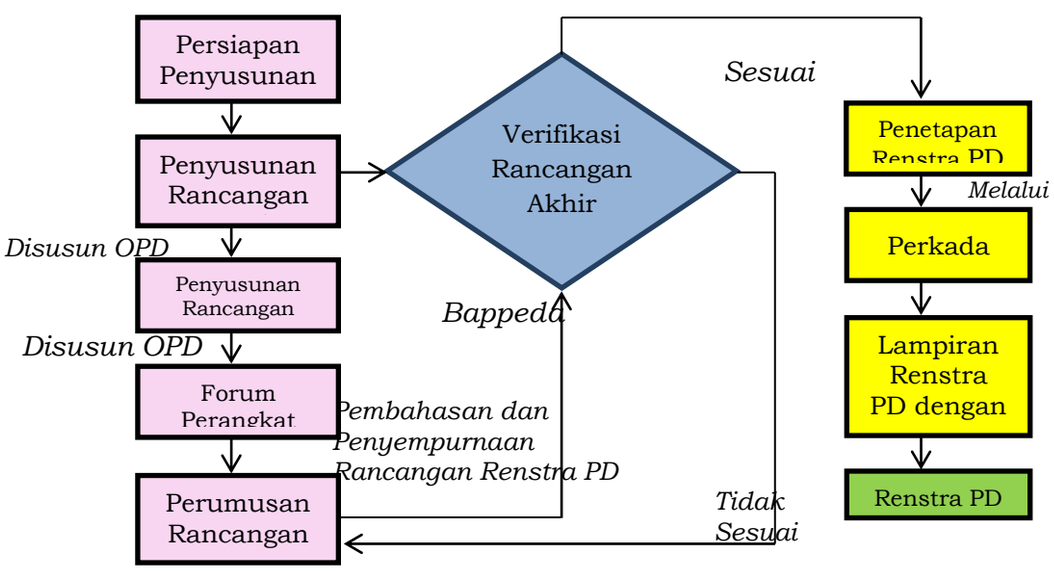

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dokumen Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang. Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut :

Gambar 1.2
Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

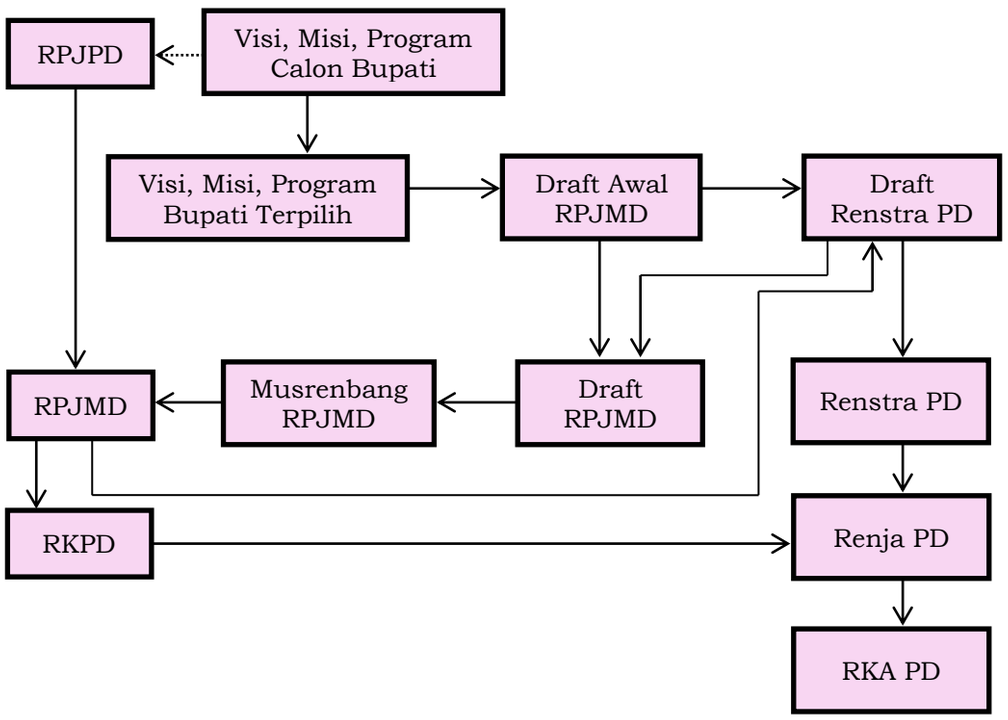

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 , berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

https://jdih.pemalangkab.go.id

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

https://jdih.pemalangkab.go.id

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2050 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Jawa Tengah Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang; (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tengah Nomor 13);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 7);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029.
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 60;
26. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
27. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
28. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 adalah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Kewilayahan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Moga untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah di Urusan Kewilayahan;
2. Menjadi pedoman kerja resmi bagi Kecamatan Moga serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Urusan Kewilayahan;
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Kecamatan Moga

https://jdih.pemalangkab.go.id

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Moga, berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Moga, sumber daya Kecamatan Moga, kinerja pelayanan Kecamatan Moga, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Moga, Permasalahan dan Isu-isu Strategis Kecamatan Moga, berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Moga, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra PD provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, penentuan isu-isu strategis.
3. Bab III Tujuan dan Sasaran, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Moga. Strategi dan Arah Kebijakan, berisi strategi dan arah kebijakan Kecamatan Moga dalam 5 (lima) tahun mendatang.
4. Bab IV Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan, berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
5. Bab V Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Moga

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN MOGA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Moga

Kecamatan Moga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Moga mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Moga

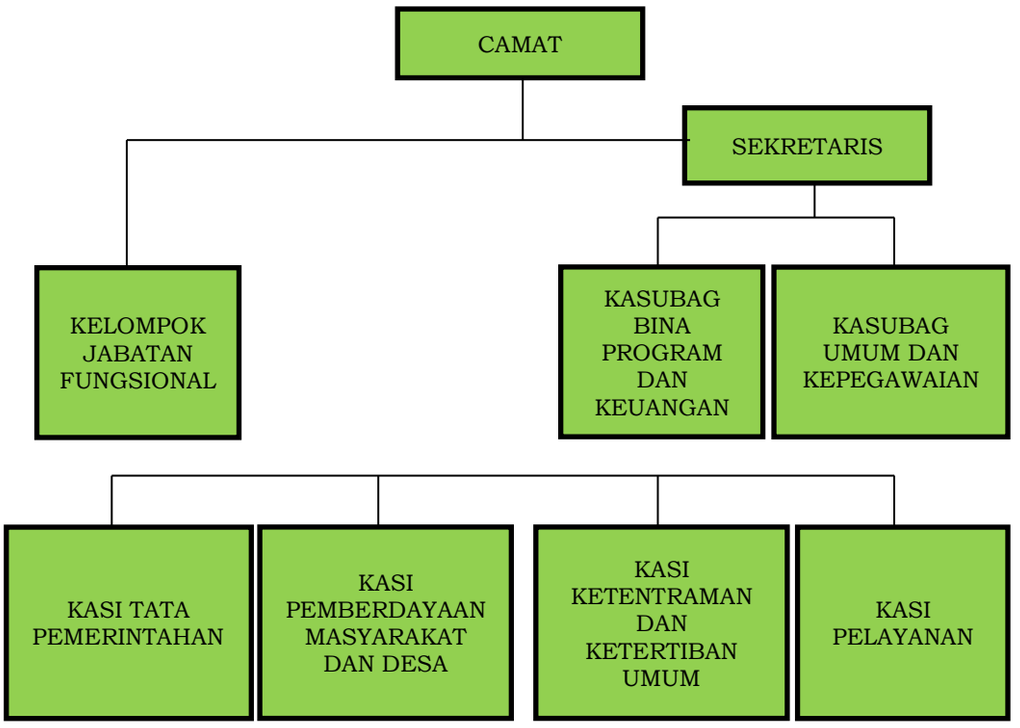

Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk

https://jdih.pemalangkab.go.id

melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

A. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Camat mempunyai uraian tugas :

1. Mengarahkan penyusunan dokumen perencanaan kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan organisasi, perencanaan partisipatif dan perencanaan yang lebih tinggi dan ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Merumuskan kebijakan kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Merumuskan inovasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
4. Mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan kecamatan, meliputi kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan umum dan kesekretariatan sesuai dengan tugas fungsi dan pedoman pelaksanaan agar tepat sasaran dan tujuan;
5. Mengarahkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

kelurahan dengan melalui bimbingan, supervisi, fasilitasi dan evaluasi guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan;

6. Mengarahkan penyediaan dan pelayaan informasi publik serta penyusunan data dan informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
7. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsinya guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh PD kabupaten yang ada di kecamatan sesuai dengan petunjuk pimpinan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
9. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan Peraturan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
10. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Merumuskan laporan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kerja organisasi.

B. Sekretaris Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan kesekretariatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi

https://jdih.pemalangkab.go.id

sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;

2. Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian sesuai dengan kebituhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
5. Mengoordinasikan penyusunan kondep inovasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
9. Melaksanakan tugas dan kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

a. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;

https://jdih.pemalangkab.go.id

2. Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Menyusun konsep dokumen perencanaan Kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan oprganisasi, perencanaan partisipatif, dan perencanaanyang lebih tinggi guna dirumuskan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep laporan capaian kinerja Kecamatan yang meliputi LkjIP, laporan pelaksanaan APBD dan laporan kinerja lain berdasarkan Renja dan realisasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban;
5. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib adminstrasi;
6. Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan keuangan;
7. Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi LRA, LO, LPE, neraca dan CaLK serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;
8. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
10. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kecamata sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepasa pimpinan; dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai sengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengelola kegiatan administrasi surat menyurat, kepegawaian, penataan arsip, dokumentas, dan kearsipan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
4. Mengelola kegiatan kerumahtanggaan meliputi penyediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, pelayanan tamu dinas dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Mengelola administrasi barang milik daerah yang meliputi penyusunan analisa kebutuhan dan pemeliharaan barang, penatausahaan barang, dan penyusunan administrasi barang lainnya sesuai dengan peraturan pengelolaan barang milik daerah guna tertib administrasi;
6. Mengelola kegiatan ketatalaksanaan meliputi penyusunan standart dan prosedur kerja sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Mengelola kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi penyediaan dan pelayanan informasi publik, penyusunan data informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian, pengaturan tata tempat dan tata acara serta kegiatan kehumasan dan keprotokolan lain sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian melalui analisis potensi dan permasalahan

https://jdih.pemalangkab.go.id

serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;

9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

C. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta, dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan memeriksa berkas yang diajukan kepala desa sebagai bahan konsultasi kepada pimpinan guna disahkan oleh pimpinan;
5. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan melalui fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, fasilitasi pemberian tunjangan perangkat desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa, dan evaluasi

https://jdih.pemalangkab.go.id

penyelenggaraan pemerintahan desa guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;

6. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Seksi Tata Pemerintahan meliputi data monografi desa, data perangkat desa dan data terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
8. Menyusun konsep motivasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

D. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, keagamaan, pembinaan kesehatan, keluarga berencana, organisasi perempuan, pendidikan, pemuda dan olahraga dengan perangkat daerah, instansi

https://jdih.pemalangkab.go.id

vertikal, swasta dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;

4. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan sosial desa melalui fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pembangunan desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjaama desa dengan pihak ketiga, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, koordinasi pendampingan desa, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial guna tertib administrasi dan kelancaran dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dengan melibatkan stakeholder terkait demi tercapainya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran;
6. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan dan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawabkan kepada pimpinan; dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

E. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan meliputi fasilitasi pengaduan masyarakat, kejadian musibag, bencana umum atau kejadian luar biasa lainnya serta upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lainnya dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan pemuka agama/tokoh masyarakat serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau desa/kelurahan serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna tegaknya peraturan;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah yang ada di wilayah kecamatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dan/atau swasta dan/atau pihak terkait lainnya sesuai dengan prosesur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keamanan dan terpeliharanya prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah;

https://jdih.pemalangkab.go.id

6. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan yang bergerak di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
7. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kebutuhan informasi publik;
9. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

F. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan kegiatan koordinasi terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan dan kabupaten, pemerintah desa/kelurahan, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;

https://jdih.pemalangkab.go.id

4. Menyusun konsep rencana operasional dan standar pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
5. Melaksanakan kegiatan fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan di bidang perizinan, non perizinan, administrasi pertanahan dan pelayanan administrasi lainnya sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dan pemeriksaan dokumen/berkas permohonan, cek lokasi apabila disyaratkan, pengesahan hingga penyampaian kembali dokumen/berkas kepada pemohon guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
6. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan prosedur dan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
7. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tercapainya kepuasan masyarakat;
8. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undanganguna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
9. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
10. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Moga

Sumber daya Kecamatan Moga sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

a. Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Jumlah pegawai di Kecamatan Moga dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyakatan sosial serta pelimpahan sebagain bupati kepada camat tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.
Pegawai Kecamatan Moga

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Golongan				Jumlah
				I	II	III	IV	
1	Camat	1	-	-	-	-	1	1
2	Sekcam	-	-	-	-	-	-	-
3	Kasubag	1	1	-	-	2	-	2
4	Kasi Kecamatan	2	1	-	-	3	-	3
5	JFU Kecamatan	5	3	-	5	3	-	8
6	JFT Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
7	Non ASN Kecamatan	7	6	-	-	-	-	13
Jumlah		**16**	**11**	**-**	**5**	**9**	**1**	**27**

Sumber : Sekretariat Kecamatan Moga, 2025

Berdasarkan keterangan di atas jumlah pegawai Kecamatan Moga berjumlah 27 orang, meliputi 16 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Moga dominan laki-laki yaitu sebanyak 60,71%. Agar Kecamatan Moga menerapkan responsif gender untuk perekrutan tenaga non ASN selanjutnya disarankan berjenis kelamin perempuan.

Jumlah pegawai pada Kecamatan Moga Golongan II sebanyak 5 orang, Golongan III sebanyak 9 orang dan Golongan IV sebanyak 1 orang. Dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Moga dominan Golongan III yaitu sebanyak 60%.

laki-laki sehingga keseluruhan Pejabat Struktural Kecamatan Moga belum mengikuti Diklat Kepemimpinan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.3.
Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pasca Sarjana (S2)	-	-	-
2	Sarjana (S1)	10	4	6
3	Diploma	3	3	-
4	SLTA	9	4	5
5	SLTP	1	1	-
6	SD	-	-	-
Jumlah		**23**	**12**	**11**

Sumber : Sekretariat Kecamatan Moga, 2025

Berdasarkan tabel di atas jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kecamatan Moga sebanyak 23 orang terdiri dari tingkat pendidikan Sarjana (S1) berjumlah 10 orang dengan jenis kelamin 4 laki-laki dan 6 berjenis kelamin perempuan, sedangkan pendidikan Diploma sebenyak 3 orang dengan jenis kelamin laki-laki, sedangkan SLTA berjumlah 9 orang dengan jenis kelamin 4 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, SLTP berjumlah 1 orang dengan jenis kelamin laki-laki. Dapat disimpulkan bahwa Pegawai Kecamatan Moga dominan berpendidikan Sarjana yaitu sebanyak 43,48%.

Tabel 2.4.
Data Pegawai Berdasar Tingkat Eselon

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	IIIA	1	1	-
2	IIIB	-	-	-
3	IVA	3	1	2
4	IVB	2	1	1
Jumlah		**6**	**5**	**2**

Sumber : Sekretariat Kecamatan Moga, 2025

Pegawai pada Kecamatan Moga berdasarkan Tingkat Eselon yaitu Eselon IIIA sebanyak 3 orang, Eselon IIIB sebanyak 2 orang, Eselon IVA sebanyak 1 orang dan Eselon IVB sebanyak 0 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Kecamatan Moga berdasarkan tingkat eselon dominan Eselon IVA yaitu sebanyak 50%.

b. Sarana dan Prasarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadapoperasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu

https://jdih.pemalangkab.go.id

ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Kecamatan Moga dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6.
Inventaris Aset Kecamatan Moga

No	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Jumlah Harga (Rp)
					Baik	Sedang	Rusak	
1	01		Tanah					
		01	Tanah	1	1	-	-	2.712.750.000,-
			Jumlah KIB A	1	1	-	-	2.712.750.000,-
2	01		Peralatan dan Mesin					
		02	Alat-alat Besar	-	-	-	-	-
		03	Alat-alat Angkutan	17	12	-	5	539.866.428,-
		04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	-	-	-
		05	Alat Pertanian	-	-	-	-	-
		06	Alat Kantor & Rumah Tangga	273	133	-	142	531.964.250,-
		07	Alat Studio & Alat Komunikasi	9	9	-	-	52.996.570,-
		08	Alat-alat Kedokteran	-	-	-	-	-
		09	Alat Laboratorium	-	-	-	-	-
		10	Alat-alat persenjataan/keamanan	-	-	-	-	-
			Jumlah KIB B	298	151	-	147	1.079.438.098,-
3	03		Gedung dan Bangunan					
		11	Bangunan Gedung	6	6	-	-	819.168.900,-
		12	Monumen	-	-	-	-	-
			Jumlah KIB C	6	6	-	-	819.168.900,-
4	04		Jalan, Irigasi dan Jaringan					
		13	Jalan & Jembatan	-	-	-	-	-
		14	Bangunan Air/Irigasi	-	-	-	-	-
		15	Instalasi	-	-	-	-	-
		16	Jaringan	2	2	-	-	2.000.000
			Jumlah KIB D	2	2	-	-	2.000.000
5	05		Aset Tetap Lainnya					
		17	Buku dan Perpustakaan	-	-	-	-	-
		18	Barang Bercorak Kebudayaan	8	8	-	-	107.500,-
		19	Hewan, Ternak dan Tanaman	-	-	-	-	-
			Jumlah KIB E	8	8	-	-	107.500,-
6	06		Konstruksi dalam Pengerjaan					
			Jumlah KIB F	-	-	-	-	-
			Jumlah Total	315	168	-	147	4.658.853.648,-

Sumber : Sekretariat Kecamatan Moga, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

c. Administrasi Kewilayahan

Terdapat 10 desa di Kecamatan Moga dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.7.
Administrasi Kewilayahan Kecamatan Moga

No	Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT	Jumlah Perangkat Desa	Jumlah Linmas	Ket
1	Plakaran	3	3	20	10	26	
2	Walangsanga	3	9	38	13	32	
3	Mandiraja	4	4	32	11	28	
4	Sima	5	14	46	12	64	
5	Banyumudal	5	10	83	14	74	
6	Moga	4	10	30	12	40	
7	Kebanggan	2	2	8	10	10	
8	Wangkelang	2	2	10	10	14	
9	Pepedan	1	1	8	9	8	
10	Gendoang	4	4	30	13	34	
Jumlah							

Sumber : Sekretariat Kecamatan Moga, 2025

2.2. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Moga

Gambaran kinerja pelayanan Kecamatan Moga Tahun 2021 - 2024 diperoleh dari dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.7 dan tabel 2.8 berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang
IKU Kecamatan Moga

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Realisasi			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas pelayanan kecamatan	Cakupan Layanan Kecamatan	78	87,31	87,64	90,89	82,36	90,89	84,22	86,45
Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan	Indek Kepuasan masyarakat yag di peroleh	82,42	84,22	85	86,50	82,36	82,70	86,50	89,28
	Nilai SAKIP	32	33	34	45	30,9	47,1	54,95	60,14

Sumber : LKJiP Kecamatan Moga

https://jdih.pemalangkab.go.id

Berdasarkan Tabel 2.7, dapat diketahui pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Moga berdasarkan IKU selama Tahun 2021-2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan dengan indikator kinerja cakupan layanan kecamatan, dari tabel di atas menunjukkan kinerja dengan indikatior tersebut melebihi target yang di tetapkan dar tahun 2021 sampai 2023, adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator tersebut yaitu :
    a. Komitmen dari semua pihak;
    b. Sarana dan prasarana yang memadai;
    c. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM;
    d. Komunikasi dan koordinasi yang intens antar instansi.

    Adanya penurunan pencapaian kinerja di tahun 2024 di sebabkan adanya program yang tidak di laksanakan di tahun 2024 sehingga berpengaruh terhadap pencapaian target, meski tidak tercapainya target namun secara umum kinerja pelayanan di kecamatan masih baik

2. Meningkatkan kinerja dan urusan layanan pemerintahan dengan indikator Indek Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari tahun 2021 sampai 2024 pencapaian kinerjanya memenuhi target yang di harapkan hal ini menunjukkan kinerja dengan indikator tersebut sangat baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :
    a. Komitmen dari semua pihak;
    b. Sarana dan prasarana yang memadai;
    c. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM;
    d. Komunikasi dan koordinasi yang intens antar instansi.
3. Meningkatkan kinerja dan urusan layanan pemerintahan dengan indikator Nilai SAKIP dari tahun 2021 sampai 2024 pencapaian kinerjanya memenuhi target yang di harapkan hal ini menunjukkan kinerja dengan indikator tersebut sangat baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :
    a. Komitmen dari semua pihak;
    b. Sarana dan prasarana yang memadai;
    c. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM;
    d. Melakukan Evaluasi secara rutin

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
1	Persentase capaian PBB	%	60,15	60,10	59,90	60,16
2	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	%	100	100	100	100
3	Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	%	23,33	23,33	23,33	23,33
4	Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan	%	93	93,24	94	94,09
5	Persentase lembaga kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang dibina	%	83,50	85,10	88	90
6	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi	%	70	75	80	85
7	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani	%	100	100	100	100
8	Jumlah potensi konflik	Kasus	0	0	0	0
9	Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik	%	80	80	80	80

Sumber : Kecamatan Moga, 2025

Persentase capaian PBB Kecamatan Moga selama kurun waktu tahun 2021-2024 cenderung stagnan dengan kisaran sebesar 60% pada tahun 2024 sebesar 60, 16% naik sebesar 0,26% dibandingkan tahun 2023. Hal ini disebabkan adanya usaha para petugas untuk meningkatkan capaian pelunasan Pajak bumi dan bangunan baik perdesaan maupun perkotaan.

Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani selama kurun waktu 2021-2024 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada pengaduan masyarakat di kecamatan dapat ditangani dengan baik dan tepat waktu.

Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2021-2024 cenderung stagnan, yaitu sebesar 23,33%. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya kendala yang terjadi di kecamatan, mulai dari kurang siapnya sumber daya manusia,

https://jdih.pemalangkab.go.id

kurangnya anggaran yang mendukung pelaksanaan tugas serta kurangnya dukungan dari PD terkait.

Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2021-2024 cenderung meningkat, yaitu sebesar 93% pada tahun 2021 menjadi sebesar 94,09% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa ada kepedulian tinggi dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang diselenggarakan mulai dari tingkat desa sampai kecamatan.

Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD) yang dibina selama kurun waktu tahun 2021-2024 cenderung meningkat, yaitu sebesar 83,50% pada tahun 2021 menjadi sebesar 90% pada tahun 2024. LKD yang dibina RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu, LPMD/K dan RT serta lembaga lain.

Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi selama kurun waktu tahun 2021-2024 cenderung meningkat, yaitu sebesar 70% pada tahun 2024 menjadi sebesar 85% pada tahun 2024. LKD merupakan mitra kecamatan dalam pembangunan kecamatan sehingga perlu untuk difasilitasi kegiatannya.

Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani selama kurun waktu tahun 2021-2024 cenderung stabil, yaitu sebesar 100% pada tahun 2021 sampai tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada gangguan ketenteraman dan kertertiban umum di tingkat desa dan kecamatan dapat ditangani dengan baik.

Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik dalam kurun waktu tahun 2021-2024 cenderung stagnan, yaitu sebesar 80% pada tahun 2021 menjadi sebesar 80% pada tahun 2024. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya kendala yang terjadi di kecamatan, mulai dari kurang siapnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas serta kurangnya dukungan dari PD terkait.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.9.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang

Uraian	Anggaran Pada Tahun (ribu)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (ribu)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (ribu)	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Program Pengembangan Kewilayahan																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	2.623.979.000	2.654.045.000	2.353.213.000	2.469.093.750	2.619.205.660	2.482.280.699,00	2.471.344.228	2.070.103.063,00	2.190.856.995		94,60	93,12	87,97	88,73	0,00	2.543.907.282	2.303.646.246,25
Program Penyelengaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	26.050.000	24.100.000	20.456.000	19.957.500	18.638.000	26.050.000	24.100.000	20.456.000	19.957.500		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	21840.300	22.640.875,00
Program Pemebrdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	64.370.000	48.280.000	57.410.000	72.550.750	71.711.840	57.655.800	48.280.000	57.384.900	72.550.750		89,57	100,00	99,96	100,00	0,00	62.864.518	58.967.862,50
Program Penyelenggaraan Ketentaraman dan Ketertiban Umum		17.365.000					17.365.000				#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	17.365.000	17.365.000,00
Program Penyelenggaraan Urusan pemerinathan Umum	32.465.000	67.825.000	67.475.000	163.010.000	79.352.300	32.461.000	67.825.000	67.474.800,00	163.015.750		99,99	100,00	100,00	100,00	0,00	82.025.460	82.694.137,50
Program Pembinaan dan Pengawasan pemerinathan Desa	54.850.000	30.620.000	58.445.000	65.551.000	46.880.200	54.848.100	30.620.000	58.445.000	65.551.000		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	51269.240	52.366.025,00

Sumber : Kecamatan Moga, 2024

Berdasar tabel 2.9, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu tahun 2021-2024 anggaran di Kecamatan Moga yang di peroleh dari APBD Kabupaten Pemalang cenderung meningkat, rasio antara realisasi dan anggaran Kecamatan Moga cenderung stabil, yaitu dengan rata – rata sebesar 97,75%. Hal ini berarti dana yang sudah dianggarkan dapat terserap secara optimal untuk pelaksanaan pelayanan Kecamatan Moga. Besaran anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Moga selama kurun waktu tahun 2021-2024. Peningkatan anggaran menjadi salah satu pendorong dapat tercapainya target kinerja pelayanan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.3. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas pokok SKPD Kecamatan Moga yaitu koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah menyelenggarakan tugas umu pemerintahan

Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Kecamatan MogaKabupaten Pemalang, maka yang menjadi target pelayanan atau kelompok sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu :

1. Unsur Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah) pelaporan data dan kondisi kependudukan, pelayanan dan hal-hal yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan wilayah Kecamatan
2. Perangkat Daerah Kecamatan Moga, dalam hal pelaporan dan pemberian informasi kepada instansi/unit kerja tarkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan
3. Pemangku Kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan
4. Seluruh masyarakat Kecamatan Moga dalam hal pelayanan, perizinan dan non perizinan
5. Aparat Deas di Lingkungan Kecematan Moga

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Moga

Kecamatan Moga dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyaihubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu

https://jdih.pemalangkab.go.id

analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik dilingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan tahun 2025-2029, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan;
6. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggarannya;
7. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Moga adalah sebagai berikut :

1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untukmeningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya Perangkat Daerah dan Pendamping Desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
3. Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;

https://jdih.pemalangkab.go.id

4. Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang bertugas menangani potensi konflik dan adanya Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Adanya Perangkat Daerah dan Pendamping Desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa;
6. Adanya pendampingan dari Perangkat Daerah terkait;
7. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Kecamatan Moga sebagai PD mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Bupati No 60 Tahun 2019, Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Bupati. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Berikut merupakan Identifikasi permasalahan-permasalahan Kecamatan Moga berserta faktor yang mempengaruhinya:

1. Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Bupati kepada camat belum sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi termasuk sarana, prasarana, dana dan personil (terlalu

https://jdih.pemalangkab.go.id

banyak pelimpahan kewenangan dari instansi teknis tidak diimbangi dengan SDM yang sesuai dengan kompetensinya).

2. Penempatan tenaga teknis berkait pelayanan Perizinan, dan pembangunan belum mencukup sesuai kompetensi.
3. Masih terdapat rangkap jabatan khusus berkait dengan pengelola keuangan, barang dll.
4. Pentingnya pemahaman dan pelaksanaan Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) bagi aparatur pelayanan pubik.
5. Masih Rendahnya persentase pembayaran PBB di wilayah kecamatan moga.
6. Koordinasi dan komunikasi perlu ditingkatkan antar tingkatan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan kewilayahan.

Tabel 2.10
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
			Internal	Eksternal	
Kesekretariatan	1. Rangkap jabatan fungsional umum 2. Sumber Daya Aparatur tidak sesuai Analisis Jabatan	UU ASN		1. Adanya moratorium pegawai.	Belum Optimalnya Penataan Aparatur Pemerintah Daerah
Ketentraman dan ketertiban Umum	1. Banyaknya pelanggaran perda Perijinan, masalah pekat kurang tenaga Pengamanan wilayah dan Kesadaran Keamanan Lingkungan 2. Regulasi Pelimpahan Kewenangan	Perda perijinan, perda Retribusi Peraturan Bupati pelimpahan kewenangan	Kurang sosialisasi perda	1. Kurang kesadaran masyarakat Untuk mengurus perizinan 2. Masih banyak pelaku pekat dan kriminalitas	1. Kurang sosialisasi perda kepada masyarakat 2. Pelaksanaan tugas tidak optimal Karena rangkap jabatan 3. Kegiatan yang dilaksanakan belom ada Juknis, Juklak

https://jdih.pemalangkab.go.id

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
			Internal	Eksternal	
Pemerintahan	1. Standar sarpras Pelayanan publik belum Memenuhi Ketentuan 2. Pelaksanaan Standar Prosedur Pelayanan belom maksimal 3. Penempatan tenaga teknis berkait Pelayanan perizinan belum mencukup sesuai kompetensi, sehingga pelaksanaan kurang optimal 4. Sarana dan prasarana ruang pelayanan Desa yang kurang representative	peraturan tentang pelayanan publik, SOP, SPP	Kondisi kantor kurang memadai	Tuntutan masyarakat atas fasilitasi pelayanan publik yang tinggi	standar pelayanan publik belum memenuhi standar pelayanan
Pembinaan Kemasyarakatan Kecamatan Moga	1. Masyarakat sangat menuntut fasilitasi dari pemerintah 2. Partisipasi Masyarakat Terhadap pelaporan rendah	Peraturan Bupati pelimpahan kewenangan	SDM masih terbatas	Tingkat kemandirian dan swadaya masyarakat rendah	Keterbatasan kewenangan kecamatan keterlambatan laporan pertanggungjawaban dari masyarakat
Penyelenggaran Perekonomian dan Pembangunan wilayah Kecamatan	1. Sarana prasarana wilayah rusak	Perbup pelimpahan kewenangan	SDM dan anggaran yang terbatas	Tuntutan masyarakat untukmemperbaikiyang rusak.	Keterbatasan kewenangan kecamatan, SDM dan anggaran.

2.6 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Penelaahan visi, isi dan program Bupati dan Wakil Bupati ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Moga yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah "**PEMALANG BERCAHAYA, BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA**". Visi ini memiliki pembentuk kata :

1. **Bersih** Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan
2. **Cakap** dimaknai memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
3. **Handal** dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.
4. **MULYA**: Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 menyebutkan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029.

Misi dalam perencanaan pembangunan memiliki beberapa fungsi, antara lain: mengarahkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai visi, mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan ke dalam satu kesatuan yang utuh, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka mencapai visi diatas berikut ini misi RPJMD 2025-2029 berdasarkan misi kepala daerah Kabupaten Pemalangyang terpilih:

1. **Misi 1 Resik**: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih. Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik
2. **Misi 2 Hijau**: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sector unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau, yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan) yang ramah lingkungan, industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM dimasyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

3. **Misi 3 Apik**: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penaatan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dari Desa
4. **Misi 4 Peduli**: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi
5. **Misi 5 Silaturahmi**: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, dan saling menghormati dan teposliro
6. **Misi 6 Organisatoris**: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan *Good Governance, Clean Governance* dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.
7. **Misi 7 Digitalisasi**: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah kabupaten Pemalang akan

https://jdih.pemalangkab.go.id

mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi

8. **Misi 8 Ikhlas**: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkan kearifan dan budaya lokal, Keterkaitan Visi dengan Misi adalah sebagai berikut:

Frase Bersih dan Handal dalam Visi akan dicapai dengan **Misi 1 Resik**: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih; **Misi 6 Organisatoris**: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi dan **Misi 7 Digitalisasi**: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar

Frase Cakap dalam Visi akan dicapai dengan **Misi 2 Hijau**: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan; **Misi 3 Apik**: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah dan **Misi 4 Peduli**: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat

Frase MULYA dalam Visi akan dicapai dengan **Misi 5 Silaturahmi**: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera dan **Misi**

https://jdih.pemalangkab.go.id

8 Ikhlas: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Pemalang tersebut, maka Kecamatan Moga sebagai salah satu PD di lingkup Pemerintah Kabupaten Pemalang, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Kabupaten Pemalang selama 5 (lima) tahun ke depan. Namun demikian, dukungan Kecamatan lebih dititikberatkan pada pencapaian misi keenam Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yaitu **: "ORGANISATORIS "** meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan *Good Governance, Clean Governance* dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai mana telah diuraikan di atas bahwa visi, misi, program RPJMD 2025-2029 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Pemalang dalam 5 (lima) tahun ke depan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Kecamatan Moga sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program Kecamatan Moga tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan

https://jdih.pemalangkab.go.id

pelayanan pada Kecamatan Moga, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

Tabel 2.11

Telaah Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati

Misi/ Program Prioritas	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
Visi : Pemalang Bercahaya				
Misi : Organisatoris "Meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi				
meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi	1. Penyelenggaraan utusan pemerintahan umum	1. Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia	1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman	1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
	2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa	2. Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan	2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/ kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan	2. Adanya PD dan Pendamping Desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan
	3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 4. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan Perda dan Perbup 5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh PD di tingkat kecamatan	3. Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan 4. Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/ kelurahan	3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan 4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan	3. Adanya Linmas yang ikut menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan 4. Adanya FDKM dan Forkompimcam yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Misi/ Program Prioritas	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
	7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa dan kelurahan 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan	5. Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik	5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam taat kelola pemerintahan	5. Adanya PD dan Pendamping Desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa
	9. Pelaksanaan administrasi kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya	6. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja	6. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran	6. Adanya pendampingan dari PD terkait
		7. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	7. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan	7. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa dan kelurahan	Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan dan beradministrasi yang baik	Masih rendahnya aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan dan beradministrasi yang baik	Adanya PD dan Pendamping Desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa

Berdasarkan analisa terhadap visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2025-2029 maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi Kecamatan Moga Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja Kecamatan Moga dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi, misi dan program prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang, antara lain :

1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya Perangkat Daerah dan Pendamping Desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;

https://jdih.pemalangkab.go.id

3. Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Adanya Perangkat Daerah dan Pendamping Desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa;
6. Adanya pendampingan dari Perangkat Daerah terkait;
7. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Kecamatan Moga dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi, misi, dan program prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang, antara lain :

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, mudah dan transparan;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketenteraman dan ketertiban umu di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan;
6. Belum optimalnya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran;
7. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.7 Telaahan Renstra Kecamatan Moga Terhadapa Perangkat daerah Lain

Telaahan terhadap Renstra PD Kabupaten Pemalang dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitasantara Renstra Kecamatan Moga dengan Renstra PD Kabupaten Pemalang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugasdan fungsinya masing-masing.

1. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pemalang

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang, tugas Satpol PP adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Adapun sasaran strategis yang telah dirumuskan yaitu : (1) meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap ketenteraman dan ketertiban umum dengan indikator persentase kawasan patuh ketenteraman dan ketertiban umum; (2) meningkatnya pelayanan kinerja Satpol PP dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja Satpol PP; dan (3) meningkatnya kualitas pelayanan kebakaran dengan indikator cakupan pelayanan kebakaran.

Sasaran dari Satpol PP yang dapat didukung oleh tupoksi Kecamatan Moga, yaitu meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap ketenteraman dan ketertiban umum dengan indikator persentase kawasan patuh ketenteraman dan ketertiban umum.

2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Pemalang

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, tugas Bakesbangpol adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik. Adapun sasaran strategis yang telah

https://jdih.pemalangkab.go.id

dirumuskan yaitu : (1) meningkatnya kondusivitas wilayah dengan indikator persentase potensi konflik sosial yang tertangani; (2) meningkatnya solidaritas keagamaan dengan indikator persentase potensi konflik agama yang tertangani; dan (3) meningkatnya pelayanan kinerja Bakesbangpol dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja Bakesbangpol.

Sasaran dari Bakesbangpol yang dapat didukung Kecamatan Moga, meliputi : (1) meningkatnya kondusivitas wilayah dengan indikator persentase potensi konflik sosial yang tertangani; dan (2) meningkatnya solidaritas keagamaan dengan indikator persentase potensi konflik agama yang tertangani.

3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes) Kabupaten Pemalang

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang, tugas Dinpermasdes adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Adapun sasaran stratergis yang telah dirumuskan yaitu : (1) meningkatnya pelayanan kinerja Dinpermasdes dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja Dinpermasdes; dan (2) meningkatnya keberdayaan desa dengan indikator jumlah Desa Berdaya.

Sasaran dari Dinpermasdes yang dapat didukung oleh Kecamatan Moga adalah meningkatnya keberdayaan desa dengan indikator jumlah Desa Berdaya.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.12
Telaah Renstra Kecamatan Moga terhadap Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang

Rennstra Kecamatan Moga	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
Renstra Satpol PP				
Persentase kawasan patuh ketenteraman dan ketertiban umum	1. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 2. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Perbup	Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan	Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan	Adanya Linmas yang ikut menjaga ketenteraman dan kertertiban umum di tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan
Renstra Bakesbangpol				
1. Persentase potensi konflik sosial yang tertangani 2. Persentase potensi konflik agama yang tertangani	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan	Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan	Adanya FKDM dan Forkompincam yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan
Renstra Dinpermasdes				
Jumlah desa berdaya	1. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa	1. Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan	1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/ kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan	1. Adanya PD dan Pendamping Desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan
	2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa dan kelurahan	2. Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik	2. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan	2. Adanya PD dan Pendamping Desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa

2.9 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

2.9.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan Kabupaten Pemalang sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa

https://jdih.pemalangkab.go.id

merusak lingkungan alam dan karakteristik Kabupaten Pemalang. Penataan ruang daerah bertujuan untuk mewujudkan ruang daerah berbasis pertanian yang didukung oleh sektor perdagangan dan industri dalam sistem wilayah terpadu dan berkelanjutan. Adapun kebijakan yang diambil, meliputi : (1) pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan wilayah; (2) pengembangan prasarana daerah; (3) pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif; (4) pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; (5) pengembangan kawasan perdagangan yang mampu menjadi pusat pemasaran hasil komoditas daerah; (6) pengembangan industri; (7) pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir; (8) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan; dan (9) pengembangan kawasan strategis daerah.

Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Kecamatan Moga tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas. Hasil telaahan tersebut adalah Nihil.

2.9.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *selfassessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 disertai juga dengan penyusunan KLHS-RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dilakukan dengan partispasi para *stakeholders* meliputi Perangkat Daerah, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Terkait dengan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Kecamatan Moga tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas. Hasil telaahan tersebut adalah Nihil.

2.2.2 Isu-isu Strategis

Permasalahan yang akan dikemukakan meliputi dua aspek yaitu permasalahan yang menyangkut kemasyarakatan atau eksternal dan permasalahan yang terjadi di instansional atau internal Perangkat Daerah Kecamatan Moga. Identifikasi permasalahan diperoleh dari evaluasi pada rencana strategis sebelumnya dan prediksi isu-isu strategis yang terjadi pada masa 5 (lima) tahun kedepan. Permasalahan tersebut antara lain :

1. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelayanan.

   Partisipasi masyarakat terhadap pelayanan dapat dikatakan belum maksimal, hal ini dengan adanya indikator antara lain, masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap jenis-jenis pelayanan dan alur pelayanan. Disamping itu masih terdapatnya masyarakat yang mewakilkan dirinya ketika berurusan dengan pelayanan baik di kelurahan maupun di kecamatan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2. Kualitas dan Kemampuan Sumber Daya Manusia/Perangkat.
   Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan Moga yang mempunyai 10 (sepuluh) desa didukung oleh sebanyak 24 orang pegawai, terdiri dari 12 orang pegawai tetap (PNS), 12 orang pegawai tidak tetap/tenaga kontrak. Pelayanan administratif yang meliputi pelayanan kesekretariatan, kependudukan, perizinan dan legalisasi. Berdasarkan jumlah tersebut jika diambil rata-rata dalam satu tahun maka setiap pegawai seharusnya mampu melayani semua pelayanan administratif, namun karena keterbatasan personil sehingga pekerjaan dilakukan oleh pegawai yang harus merangkap beberapa jabatan sekaligus. Pada unit-unit tertentu terdapat penumpukan pekerjaan, sehingga kadang-kadang tidak sesuai tugas pokok fungsi.
3. Pelaksanaan Standar Prosedur Pelayanan.
   Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan serta regulasi yang mengatur, Kecamatan Moga telah mempunyai Standar Prosedur Pelayanan yang berupa SOP dan SPP. Pelaksanaan standar prosedur ini belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena adanya keterbatasan pelaksana dan duplikasi pekerjaan, di samping itu dengan kualitas personil yang tidak merata terdapat hambatan dalam alur pelayanan.
4. Regulasi Pelimpahan Kewenangan
   Kecamatan sebagai Perangkat Daerah telah mendapat pelimpahan wewenang dari Bupati Pemalang. Kewenangan tersebut disamping bersifat aplikatif juga bersifat koordinatif dan fasilitatif. Kewenangan terlaksana harus diimbangi adanya pemenuhan sumberdaya baik sumber manusia maupun sumber dana. Pada saat ini

https://jdih.pemalangkab.go.id

sumberdaya belum semua dapat mengampu terhadap pelaksanaan pelimpahan kewenangan, terkadang kewenangan yang bersifat bersama atau *concurrent,* kecamatan belum diberikan porsi yang sesuai dengan kewenangannya.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2026-2030, dengan berpedoman pada Visi Kabupaten Pemalang Tahun 2026-2030 adalah "PEMALANG BERCAHAYA, BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA" Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Pemalang, Kecamatan Moga akan melaksanakan program, kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Moga

3.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Moga berdasarkan tujuan ke 5 susai RPJMD Kabupaten Pemalang 2025-2029 melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Adapun tujuannya yaitu "**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan**" dengan indikator Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan

3.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan). Dari masing – masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Moga menetapkan Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dengan indikator 1. Nilai SKM dengan rumuas hitung Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang 2. Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri, dengan rumus hitung Jumlah Desa mandiri dai bagi jumlah desa di kecamatan moga 100 Target tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Moga, dari tahun 2025 – 2029 tersaji pada Tabel 3.1 sebagai berikut.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.1

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kecamatan Moga

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	TARGET TAHUNAN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan		Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan	Angka	2	3	4	4	5	5	
2		Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Nilai SKM	%	90	91	92	93	94	95	
			Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri	%	20	30	40	40	50	50	

3.2 Strategi

Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kecamatan Moga mencakup penentuan kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh Pemerintah Daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara / langkah demi langkah yang dilakuan organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran – sasaran perencanaan strategisnya. Strategi yang akan dilakukan oleh Kecamatan Moga adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan penyediaan pendukung bagi pelayanan kinerja Kecamatan Moga;
b. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah yang dilakukan melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan dengan Bakesbangpol;
c. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan melalui peningkatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda dan Perkada dengan Satpol PP;
d. Meningkatkan layanan kecamatan yang dilakukan melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
e. Meningkatkan kemandirian desa yang dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
f. Meningkatkan kemandirian desa yang dilakukan melalui pemberdayaan bagi masyarakat desa dan kelurahan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Penahapan pembangunan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di kecamatan moga sebagaimana dengan fungsi kecamatan dan pelimpahan kewenangan bupati kepada camat dapat di lihat pada tabel berikut

Tabel 3.2

Tahapan Rencana Strategis

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
Upaya Peningkatan Kegiatan yang merupakan sebagian pelimpahan kewenagan bupati kepada camat dan tugas lain yang menjadi fungsi dari kecamatan	Peningkatan Kegiatan yang merupakan sebagian pelimpahan kewenagan bupati kepada camat dan tugas lain yang menjadi fungsi dari kecamatan	Peningkatan Penguatan Kegiatan yang merupakan sebagian pelimpahan kewenagan bupati kepada camat dan tugas lain yang menjadi fungsi dari kecamatan	Penguatan Kegiatan yang merupakan sebagian pelimpahan kewenagan bupati kepada camat dan tugas lain yang menjadi fungsi dari kecamatan	Evaluasi Kegiatan yang merupakan sebagian pelimpahan kewenagan bupati kepada camat dan tugas lain yang menjadi fungsi dari kecamatan

3.3 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati pihak – pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah Strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Moga menunjukan bagaimana cara Kecamatan Moga mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Moga. Arah kebijakan Kecamatan Moga adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan kualitas pelayanan melalui Menjamin kualitas perencanaan dan pengendalian program/kegiatan, Perbaikan berkelanjutan terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi

https://jdih.pemalangkab.go.id

pemerintah (SAKIP), Indeks Reformasi Birokrasi (IRB),Penyediaan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan standar kebutuhan dan administrasi lainnya yang mampu mendukung kinerja di Kecamatan Moga;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum difokuskan pada pelaksanaan hari besar, sosialisasi wawasan kebangsaan, penanganan potensi konflik sosial serta pelaksanaan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dan peningkatan kerukunan umat beragama;

c. Peningkatan koordinasi difokuskan pada pelatihan Linmas serta pelaksanaan monitoring Perda dan Perkada di wilayah Kecamatan bersinergi dengan Kepolisisn Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal*;*

d. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik difokuskan pada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan meliputi penyediaan data pemerintahan,, penyusunan SOP Pelayanan, pencapaian standar pelayanan minimal, pengaduan masyarakat, Perizinan, Non Perizinan serta pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat;

e. Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa difokuskan pada saat penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Administrasi tata pemerintahan desa, Pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa, pelaksanaan tugas kepala dan perangkat desa, pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemusyawaratan desa, sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa, perencanaan pembangunan partisipatif serta penyusunan program dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat desa;

f. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan difokuskan melalui penyelenggaraan musrenbang desa, musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, penyediaan sarana prasarana kelurahan, pelatihan pemberdayaan masyarakat, verval Data Terpadu Kesejahteraan Sosial serta pembinaan, fasilitasi dan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan. Pembinaan peningkatan status desa dari berkembang manjadi maju dan maju menjadi desa mandiri

https://jdih.pemalangkab.go.id

Berikut ini merupakan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pada misi meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi

Tabel 3.2

Arah Kebijakan Resntra Perangkat Daerah

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
	Meniingkatkan sarana dan prasrana pelayanan publik	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan kepuasan pada masyarakat;	1. Peningkatan kualitas pelayanan melalui penjaminan kualitas perencanaan dan pengendalian program/kegiatan, Perbaikan berkelanjutan terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), Penyediaan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan standar kebutuhan, dan administrasi lainnya yang mampu mendukung kinerja di Kecamatan Moga 2. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik difokuskan pada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan meliputi penyediaan data pemerintahan,, penyusunan SOP Pelayanan, pencapaian standar pelayanan minimal, pengaduan masyarakat, Perizinan, Non Perizinan serta pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat.	
	Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	2. Peningkatan kondusivitas wilayah dengan peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama dan pemahaman wawasan kebangsaan	3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum difokuskan pada pelaksanaan hari besar, sosialisasi wawasan kebangsaan, penanganan potensi konflik sosial serta pelaksanaan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dan peningkatan kerukunan umat beragama	
	Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum	3. Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan difokuskan pada peningkatan Indeks Desa, Peningkatan peran BUMDes dalam pembangunan daerah,	4. Peningkatan koordinasi difokuskan pada pelatihan Linmas serta pelaksanaan monitoring Perda dan Perkada di wilayah Kecamatan bersinergi dengan Kepolisisn Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal.	

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
	Membina dan Mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan / atau kelurahan	4. Peningkatan pembinaan dan pengawasan kecamatan dalam pembangunan desa dan kelurahan dan Pengembangan kerjasama antar desa;	5. Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa difokuskan pada saat penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Administrasi tata pemerintahan desa, Pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa, pelaksanaan tugas kepala dan perangkat desa, pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemusyawaratan desa, sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa, perencanaan pembangunan partisipatif serta penyusunan program dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat desa	
		5. Peningkatan penanganan PPKS melalui jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi, kerjasama intervensi lintas sektor dan swasta dengan memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);		
	Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan difokuskan pada peningktan indeks desa, peningkatan peran BUMDes dalam pembangunan daerah, peningkatan pembinaan dan pengawasan kecamatan dalam pembangunan desa/kelurahan dan pengembangan kerjasama antar dan pengembangan kerjasama antar desa	6. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan difokuskan melalui penyelenggaraan musrenbang desa, musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, penyediaan sarana prasarana kelurahan, pelatihan pemberdayaan masyarakat, verval Data Terpadu Kesejahteraan Sosial serta pembinaan, fasilitasi dan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan. Pembinaan peningkatan status desa dari berkembang manjadi maju dan maju menjadi desa mandiri	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB IV
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Moga yang akan dilaksanakan pada tahun 2026-2030 :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      h. Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
   3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

https://jdih.pemalangkab.go.id

c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
g. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
   c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

https://jdih.pemalangkab.go.id

a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
   a. Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
   b. Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah
   c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
   a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
   b. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
   c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
   a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
   b. Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

https://jdih.pemalangkab.go.id

2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
    a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
    a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
    b. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
    c. Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
    d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

F. Program Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintahan Desa
1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
    b. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
    c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
    d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
    e. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
    f. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
    g. Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

https://jdih.pemalangkab.go.id

h. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
i. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
j. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
k. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Rumusan program dan kegiatan, dan subkegiatan dalam renstra Keecamatan Moga dapat di lihat di tabel 4.1, sedangkan Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan yang telah ditetapkan d tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Kecamatan Moga selama tahun 2026-2030 dapat dilihat pada Tabel 4.1

https://jdih.pemalangkab.go.id

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pemalang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanan Kecamatan Moga. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Kecamatan Moga serta teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Moga seperti Tabel berikut :

Tabel 4.1

Rumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah
Kecamatan Moga

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan				Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan		
2			Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat			Nilai SKM		
						Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri		

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
3				Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai Sakip	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB / KOTA	
5					Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi	Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
6						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	
7						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	
8						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	
9						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	
10						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	
11						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi kinerja perangkat daerah	
						Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
13					Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
14						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	
15						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	
16						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	
18					Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
19						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
20						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
21						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan peralatan rumah tangga	
22						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan bahan logistik kantor	
23						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
24						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
25						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	
26							Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	
27					Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
28						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	
29						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan mebel	
30						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
31						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	
32					Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
33						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	
34						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
35						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	
36					Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
37						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	
38						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan mebel	
39						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	
40						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
41						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	
42			Meningkatnya kualitas penyeelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik		Persesntase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
43					Jumlah data pemerintahan yang dipublikasi	Persentase data pemerintahan yang dipublikasi	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
44							Peningkatkan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	
45					Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
46							Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	
47							Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
48							Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	
49					Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	Persentase pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
50							Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	
51							Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	
52			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
53					Jumlah peserta Musrenbang (Desa/ Kelurahan + Kecamatan)	Persentase kehadiran Musrenbang (Desa/ Kelurahan + Kecamatan)	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
54							Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
55							Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	
56							Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	
57			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	**PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	
58					Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	Persentase peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
59							Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan	
60					Jumlah Perda dan Perbup yang dikoordinasikan penegakannya	Persentase Perda dan Perbup yang dikoordinasikan penegakannya	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
61							Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
62			Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama		Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
63					Persentase jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun	Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
64							Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
							pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
65							Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	
66							Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
67							Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	
68			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa			Persentase kesesuaian RKPDes dan RPJMDes dengan RPJMD	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	
69					Persentase jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun	jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
70							Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	
71							Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	
72							Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	
73							Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
74							Fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa	
75							Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyaratan Desa	
76							Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	
77							Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	
78							Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	
79							Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
							partisipatif	
80							Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	

4.2 Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Pendanaan

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2

Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan			Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan	*Jumlah*	*2*	*3*		*3*		*3*		*4*		*4*		
	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat		Nilai SKM	Nilai		91		92		91		91		91		
			Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri	%		30		30		30		40		40		Kec. Moga

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	60	61	2.987.186.000	61	3.007.186.000	61	2.987.186.000	61	2.992.186.000	61	2.987.186.000	Kec. Moga
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi	Dokumen	14	16	30.375.000	16	30.375.000	16	30.375.000	16	30.375.000	16	30.375.000	Kec. Moga
			Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi	%	100	100		100		100		100		100		Kec. Moga
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	6.500.000	4	6.500.000	4	6.500.000	4	6.500.000	4	6.500.000	Kec. Moga
		Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1.350.000	1	1.350.000	1	1.350.000	1	1.350.000	1	1.350.000	Kec. Moga
		Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1.350.000	1	1.350.000	1	1.350.000	1	1.350.000	1	1.350.000	Kec. Moga
		Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1.350.000	1	1.350.000	1	1.350.000	1	1.350.000	1	1.350.000	Kec. Moga
		Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	1	1.350.000	1	1.350.000	1	1.350.000	1	1.350.000	1	1.350.000	Kec. Moga
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	625.000	4	625.000	4	625.000	4	625.000	4	625.000	Kec. Moga
		Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2	15.850.000	2	15.850.000	2	15.850.000	2	15.850.000	2	15.850.000	Kec. Moga

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Baerita Acara		2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	Kec Moga
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi	Dokumen	3	3	2.069.511.000	3	2.069.511.000	3	2.069.511.000	3	2.069.511.000	3	2.069.511.000	Kec. Moga
			Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi	%	100	100		100		100		100		100		Kec. Moga
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	orang/ bulan	17/14	17/14	2.068.436.000	17/14	2.068.436.000	17/14	2.068.436.000	17/14	2.068.436.000	17/14	2.068.436.000	Kec. Moga
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1	550.000	1	550.000	1	550.000	1	550.000	1	550.000	Kec. Moga
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	1	1	525.000	1	525.000	1	525.000	1	525.000	1	525.000	Kec. Moga
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	Paket	44	44	143.350.000	46	148.350.000	44	143.350.000	46	148.350.000	44	143.350.000	Kec. Moga
			Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	%	100	100		100		100		100		100		Kec. Moga
		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	14.500.000	12	14.500.000	12	14.500.000	12	14.500.000	12	14.500.000	Kec. Moga
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	Kec. Moga
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	-	-	-	2	5.000.000	-	-	2	5.000.000	-	-	Kec. Moga
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	74.660.000	12	74.660.000	12	74.660.000	12	74.660.000	12	74.660.000	Kec. Moga
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	10.250.000	12	10.250.000	12	10.250.000	12	10.250.000	12	10.250.000	Kec. Moga

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	3	2.940.000	3	2.940.000	3	2.940.000	3	2.940.000	3	2.940.000	Kec. Moga
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	100	100	21.000.000	120	21.000.000	100	21.000.000	100	21.000.000	100	21.000.000	Kec. Moga
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	unit	30	30	137.300.000	29	137.300.000	29	137.300.000	29	137.300.000	29	137.300.000	Kec. Moga
			Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	%	100	100		100		100		100		100		Kec. Moga
		Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1	1	30.250.000	1	30.250.000	1	30.250.000	1	30.250.000	1	30.250.000	Kec. Moga
		Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	18	18	47.350.000	18	47.350.000	18	47.350.000	18	47.350.000	18	47.350.000	Kec. Moga
		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	11	10	29.700.000	10	29.700.000	10	29.700.000	10	29.700.000	10	29.700.000	Kec. Moga
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	1	30.000.000	-	30.000.000	-	30.000.000	-	30.000.000	-	30.000.000	Kec. Moga
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	417	415	251.600.000	415	251.600.000	415	251.600.000	415	251.600.000	415	251.600.000	Kec. Moga
			Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100		Kec. Moga
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	400	400	32.000.000	400	32.000.000	400	32.000.000	400	32.000.000	400	32.000.000	Kec. Moga
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3	24.600.000	3	24.600.000	3	24.600.000	3	24.600.000	3	24.600.000	Kec. Moga

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	Kec. Moga
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	10	165.000.000	10	165.000.000	10	165.000.000	10	165.000.000	10	165.000.000	Kec. Moga
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	unit	103	103	355.050.000	165	370.050.000	103	355.050.000	103	355.050.000	103	355.050.000	Kec. Moga
			Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	%	100	100		100		100		100		100		Kec. Moga
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	12	12	94.400.000	13	94.400.000	12	94.400.000	12	94.400.000	12	94.400.000	Kec. Moga
		Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	-	-	-	50	15.000.000	-	-	-	-	-	-	Kec. Moga
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	86	86	55.000.000	97	55.000.000	86	55.000.000	86	55.000.000	86	55.000.000	Kec. Moga
		Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	2	145.650.000	2	145.650.000	2	145.650.000	2	145.650.000	2	145.650.000	Kec. Moga
		Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	3	60.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	Kec. Moga
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persesntase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	%	73,33	73,33	17.454.000	73,33	17.454.000	73,33	17.454.000	73,33	17.454.000	73,33	17.454.000	Kec. Moga
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun	Dokumen	4	4	4.476.000	4	4.476.000	4	4.476.000	4	4.476.000	4	4.476.000	Kec. Moga
			Persentase dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun	%	65	65		65		65		65		65		Kec. Moga

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Peningkatkan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	4	4	4.476.000	4	4.476.000	4	4.476.000	4	4.476.000	4	4.476.000	Kec. Moga
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun	Dokumen	-	-	7.906.000	3	7.906.000	-	7.906.000	-	7.906.000	-	7.906.000	Kec. Moga
			Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun	%	-	-		100		-		-		-		Kec. Moga
		Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat	Dokumen	3	3	1.184.000	5	1.184.000	3	1.184.000	3	1.184.000	3	1.184.000	Kec. Moga
		Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	-	-	3.212.000	4	3.212.000	-	3.212.000	-	3.212.000	-	3.212.000	Kec. Moga
		Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	-	-	3.510.000	3	3.510.000	-	3.510.000	-	3.510.000	-	3.510.000	Kec. Moga
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang tersusun	Dokumen	2	2	5.072.000	2	5.072.000	2	5.072.000	2	5.072.000	2	5.072.000	Kec. Moga
			Persentase dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	%	70	70		70		70		70		70		Kec. Moga
		Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	45	45	3.072.000	50	3.072.000	45	3.072.000	45	3.072.000	45	3.072.000	Kec. Moga

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	Kec. Moga
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	%	84	84	81.711.840	88	81.711.840	84	81.711.840	84	81.711.840	84	81.711.840	Kec. Moga
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun	orang	110	110	81.711.840	110	81.711.840	110	81.711.840	110	81.711.840	110	81.711.840	Kec. Moga
			Persentase dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun	%	83	83		85		85		85		85		Kec. Moga
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	10	10	33.386.000	10	33.386.000	10	33.386.000	10	33.386.000	10	33.386.000	Kec. Moga
		Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah dokumen sinkronisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Dokumen	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Kec. Moga
		Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	10	10	23.325.840	4	23.325.840	10	23.325.840	10	23.325.840	10	23.325.840	Kec. Moga
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang aktif	lembaga	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	Kec. Moga
			Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang aktif	%	85	85		90		85		85		85		Kec. Moga
		Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	lembaga	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	Kec. Moga
		Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Moga
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	%	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	Kec. Moga

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun	Laporan	-	-	20.000.000	20	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	Kec. Moga
			Persentase laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun	%	-	-		80		-		-		-		Kec. Moga
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Kecamatan	Laporan	-	-	10.000.000	20	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	Kec. Moga
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang	Laporan	-	-	5.000.000	4	5.000.000	-	5.000.000	-	5.000.000	-	5.000.000	Kec. Moga
			Persentase Perda dan Perbup yang dikoordinasikan penegakannya	%	-	-		80		-		-		-		Kec. Moga
		Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah yg tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan atau kepolisan negara RI	Laporan	-	-	5.000.000	4	5.000.000	-	5.000.000	-	5.000.000	-	5.000.000	Kec. Moga
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	%	100	100	79.353.300	100	79.353.300	100	79.353.300	100	79.353.300	100	79.353.300	Kec. Moga
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun	Dokumen	3	3	79.353.300	3	79.353.300	3	79.353.300	3	79.353.300	3	79.353.300	Kec. Moga
			Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun	%	100	100		100		100		100		100		Kec. Moga

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	Orang	2	2	63.853.300	2	63.853.300	2	63.853.300	2	63.853.300	2	63.853.300	Kec. Moga
		Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	30	30	2.000.000	30	2.000.000	30	2.000.000	30	2.000.000	30	2.000.000	Kec. Moga
		Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Laporan	-	-	1.500.000	3	1.500.000	-	1.500.000	-	1.500.000	-	1.500.000	Kec. Moga
		Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	15	15	12.000.000	15	12.000.000	15	12.000.000	15	12.000.000	15	12.000.000	Kec. Moga
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kesesuaian RKPDes dan RPJMDes dengan RPJMD	%	100	100	46.880.200	100	46.880.200	100	46.880.200	100	46.880.200	100	46.880.200	Kec. Moga
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun	desa	5	5	46.880.200	5	46.880.200	5	46.880.200	5	46.880.200	5	46.880.200	Kec. Moga
			Persentase dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun	%	50	50		50		50		50		50		Kec. Moga
		Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades	Dokumen	10	10	3.853.400	45.940	3.853.400	10	3.853.400	10	3.853.400	10	3.853.400	Kec. Moga
		Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata	Dokumen	10	10	6.693.200	10	6.693.200	10	6.693.200	10	6.693.200	10	6.693.200	Kec. Moga
		Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Dokumen	10	10	4.850.000	10	4.850.000	10	4.850.000	10	4.850.000	10	4.850.000	Kec. Moga

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan perankat daerah	Dokumen	30	30	6.408.880	30	6.408.880	30	6.408.880	30	6.408.880	30	6.408.880	Kec. Moga
		Fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	-	-	5.609.360	10	5.609.360	-	5.609.360	-	5.609.360	-	5.609.360	Kec. Moga
		Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Permusyawaratan Desa	Dokumen	20	20	3.774.760	20	3.774.760	20	3.774.760	20	3.774.760	20	3.774.760	Kec. Moga
		Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	4	4	4.314.200	4	4.314.200	4	4.314.200	4	4.314.200	4	4.314.200	Kec. Moga
		Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	JumlJumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan (RKPDes dan APBDes) Desa	Dokumen	10	10	2.246.400	10	2.246.400	10	2.246.400	10	2.246.400	10	2.246.400	Kec. Moga
		Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Linmas	Dokumen	20	20	2.500.000	20	2.500.000	20	2.500.000	20	2.500.000	20	2.500.000	Kec. Moga
		Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	10	10	2.430.000	10	2.430.000	10	2.430.000	10	2.430.000	10	2.430.000	Kec. Moga
		Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	30	30	4.200.000	30	4.200.000	30	4.200.000	30	4.200.000	30	4.200.000	Kec. Moga

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.3 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama, RPJMD, dan Pendanaan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3

Daftar Sub Kegiatan yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB / KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi kinerja perangkat daerah	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
		Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	
		Terlaksananya Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	
		Tersedianya Mebel	Pengadaan mebel	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan mebel	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Peningkatkan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
			Perencanaan kegiatan pelayanan kepada	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			masyarakat di kecamatan	
			Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	
			Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	
			Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	
			Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	
			Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			kecamatan	
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	
			Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
			Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Meningkatnya pembinaan dan pegawasan pemerintahan desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
	DESA		Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	
			Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	
			Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	
			Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
			Fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa	
			Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyaratan Desa	
			Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	
			Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	
			Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	
			Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	
			Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk memberi Gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi perangkat daerah pada akhir Periode Renstra. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator Sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat mandiri setiap Tahun.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Moga tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2029 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel. 4.3

Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	TARGET TAHUNAN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan		Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan	Angka	2	3	3	3	4	4
2		Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Nilai SKM	%	90	91	92	93	94	95
			Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri	%	20	30	30	30	40	40

Pada tabel 4.3 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja pada Kecamatan Moga yang mengacu pada tujuan dan sasaran RKPD Kabupaten Mempawah tahun 2025-2029 terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama dimana target capaian yang ingin dicapai pada setiap tahunnya selalu meningkat. Indikator yang telah ditetapkan di Kabupaten Moga untuk mencapai misi keenam yaitu meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kabupaten Pemalang akan mewujudkan *Good Governance, Clean Governance* dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Moga tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan periode Tahun 2025 – 2029 dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pemalang yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029. Sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementrian dan Renstra PD Kabupaten Pemalang yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan di Kabupaten Pemalang.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sadaniang tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Kecamatan Sadaniang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Kecamatan Sadaniang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sadaniang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2026 hingga tahun 2029. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Moga ini.

Pemalang, 2025

CAMAT MOGA

HARINTO, S.STP
Pembina
NIP. 19821010201202 1 001

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pulosari Tahun 2025–2029 merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di tingkat kecamatan. Renstra ini juga merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029 yang menjadi dokumen arah pembangunan jangka menengah lima tahunan.

Penyusunan Renstra Kecamatan Pulosari berlandaskan pada amanat regulasi, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menegaskan pentingnya konsistensi antara perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan serta keterpaduan antara pusat dan daerah.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan kecamatan sebagai perangkat daerah kewilayahan dengan fungsi koordinatif atas pembangunan dan pelayanan publik di wilayahnya.
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Resiko Pembangunan Nasional
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renstra PD, yang menjadi pedoman teknis penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Renstra Kecamatan Pulosari memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah karena:

1. Menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
2. Menjamin keterpaduan antara perencanaan jangka menengah daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis kinerja, dengan tolok ukur keberhasilan berupa indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Pulosari dilakukan secara partisipatif dan teknokratik, dimulai dari analisis kondisi eksisting dan permasalahan aktual pelayanan publik, penelaahan terhadap RPJMD Kabupaten Pemalang 2025–2029, hingga penjabaran tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program yang bersifat lintas desa serta kolaboratif dengan lembaga kemasyarakatan. Proses ini juga mempertimbangkan input dari forum konsultasi publik, musrenbang kecamatan, dan koordinasi lintas sektoral.

Secara administratif, Kecamatan Pulosari merupakan salah satu dari 14 kecamatan di Kabupaten Pemalang dengan karakter wilayah pegunungan yang kaya akan potensi sumber daya alam dan budaya lokal, namun juga menghadapi tantangan geografis seperti risiko longsor dan keterbatasan akses. Dengan luas wilayah 87,52 km² yang meliputi 12 desa, Kecamatan Pulosari memiliki tanggung jawab penting sebagai penyelenggara sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati serta sebagai pusat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pembangunan di tingkat kecamatan kini menuntut pendekatan yang lebih terukur, adaptif, dan partisipatif. Kecamatan sebagai perangkat daerah kewilayahan diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi simpul sinergi lintas desa, memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta menginisiasi inovasi pelayanan publik berbasis potensi lokal.

Di sisi lain, dinamika masyarakat dan kompleksitas tantangan sosial-ekonomi yang dihadapi warga Pulosari menuntut pelayanan publik yang semakin berkualitas, cepat, responsif, serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di desa-desa terpencil atau wilayah rawan bencana. Perubahan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan, perkembangan teknologi informasi, serta tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbuka menjadi latar belakang penting dalam perumusan strategi pembangunan kecamatan ke depan.

Lebih jauh, penyusunan Renstra ini juga memperhatikan sejumlah dokumen perencanaan yang relevan dan saling terintegrasi, seperti RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2045 yang menekankan tahap pertama pembangunan dengan tema Perkuatan Fondasi Transformasi, RPJMD Kabupaten Pemalang 2025–2029 yang menjadi induk arah kebijakan lima tahun di Kabupaten Pemalang, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Perangkat Daerah Lainny serta Renja Kecamatan Pulosari yang akan disusun setiap tahun sebagai penjabaran tahunan dari dokumen Renstra ini. Seluruh acuan tersebut memperjelas bahwa kecamatan tidak lagi dapat bersikap pasif atau administratif semata, melainkan harus menjadi aktor aktif dalam mendukung transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola di tingkat lokal.

Kecamatan Pulosari sendiri menghadapi sejumlah isu krusial seperti belum optimalnya digitalisasi pelayanan, disparitas kapasitas antar desa, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta perlunya penguatan kelembagaan desa dan lembaga masyarakat. Dengan

https://jdih.pemalangkab.go.id

merumuskan tujuan, sasaran, strategi, program, dan indikator kinerja yang relevan, Renstra ini diharapkan mampu menjadi instrumen kendali yang strategis dalam mengarahkan pembangunan kecamatan yang lebih responsif dan kontekstual.

Dengan demikian, Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025–2029 disusun tidak hanya sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai komitmen moral dan instrumen kebijakan dalam mewujudkan Kecamatan Pulosari yang lebih berdaya, harmonis, dan tangguh, sekaligus menopang terwujudnya visi Kabupaten Pemalang **"BERCAHAYA"** dan mendukung terwujudnya Kabupaten Pemalang yang lebih **Resik, Hijau, Apik, Peduli, Silaturahmi, Organisatoris dan Digital** sesuai misi Pembangunan Daerah yang dikenal dengan singkatan ***RHAPSODI.***

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diubah terakhir kali dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

https://jdih.pemalangkab.go.id

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Republik 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);

https://jdih.pemalangkab.go.id

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 98);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 10, Nomor Register

https://jdih.pemalangkab.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah: (10-186/2020));

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daeah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 7, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah: (7-191/2022));
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 141, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah: (12-283/2024);

1.3. Maksud dan tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Kecamatan Pulosari adalah:

1. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya selama periode lima tahun (2025–2029);
2. Menjabarkan RPJMD ke dalam rencana yang lebih operasional sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan jangka menengah antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota**;**
4. Menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja PD) dan penganggaran (KUA-PPAS, APBD);
5. Mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis kinerja melalui indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK);
6. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah**.**

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah:

1. Menetapkan tujuan, dan sasaran Perangkat Daerah yang selaras dengan RPJMD Kabupaten/Kota;
2. Menentukan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
3. Merinci program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah yang dilaksanakan dalam lima tahun mendatang;
4. Menetapkan indikator dan target kinerja, sebagai dasar pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran;
5. Mengintegrasikan dan mensinergikan pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan wilayah;
6. Memberikan dasar evaluasi dan pengendalian, baik internal maupun eksternal, terhadap kinerja Perangkat Daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id

1.3.3. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat:

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
   a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
   b. Sumber daya Perangkat Daerah;
   c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
   d. Kelompok sasaran layanan (misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah).

   Catatan: dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti:
   a. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada);
   b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (apabila ada); dan
   c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah (apabila ada).
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
   a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
   b. Isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III paling sedikit memuat:

1. Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029;
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV paling sedikit memuat:

1. Uraian Program;

https://jdih.pemalangkab.go.id

2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Pulosari

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Pulosari mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

a. Camat;
b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
    1. Subbagian Bina Program dan Keuangan.
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Seksi Tata Pemerintahan;
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
f. Seksi Pelayanan;
g. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Gambar 2 1 Struktur Organisasi Kecamatan Pulosari

Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di

https://jdih.pemalangkab.go.id

wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

A. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Camat mempunyai uraian tugas :

1. Mengarahkan penyusunan dokumen perencanaan kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan organisasi, perencanaan partisipatif dan perencanaan yang lebih tinggi dan ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Merumuskan kebijakan kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Merumuskan inovasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
4. Mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan kecamatan, meliputi kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan umum dan kesekretariatan sesuai dengan tugas fungsi dan pedoman pelaksanaan agar tepat sasaran dan tujuan;
5. Mengarahkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan dengan melalui bimbingan, supervisi, fasilitasi dan evaluasi guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan;
6. Mengarahkan penyediaan dan pelayaan informasi publik serta penyusunan data dan informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
7. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsinya guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;

https://jdih.pemalangkab.go.id

8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh PD kabupaten yang ada di kecamatan sesuai dengan petunjuk pimpinan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
9. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan Peraturan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
10. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Merumuskan laporan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kerja organisasi.

B. Sekretaris Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan kesekretariatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian sesuai dengan kebituhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
5. Mengoordinasikan penyusunan kondep inovasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;

https://jdih.pemalangkab.go.id

6. Mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
9. Melaksanakan tugas dan kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

a. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Menyusun konsep dokumen perencanaan Kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan oprganisasi, perencanaan partisipatif, dan perencanaanyang lebih tinggi guna dirumuskan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep laporan capaian kinerja Kecamatan yang meliputi LkjIP, laporan pelaksanaan APBD dan laporan kinerja lain berdasarkan Renja dan realisasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban;
5. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib adminstrasi;
6. Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan keuangan;
7. Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi LRA, LO, LPE, neraca dan CaLK serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;
8. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Subbagian Bina Program dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Keuangan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;

10. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kecamata sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepasa pimpinan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai sengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengelola kegiatan administrasi surat menyurat, kepegawaian, penataan arsip, dokumentas, dan kearsipan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
4. Mengelola kegiatan kerumahtanggaan meliputi penyediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, pelayanan tamu dinas dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Mengelola administrasi barang milik daerah yang meliputi penyusunan analisa kebutuhan dan pemeliharaan barang, penatausahaan barang, dan penyusunan administrasi barang lainnya sesuai dengan peraturan pengelolaan barang milik daerah guna tertib administrasi;
6. Mengelola kegiatan ketatalaksanaan meliputi penyusunan standart dan prosedur kerja sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Mengelola kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi penyediaan dan pelayanan informasi publik, penyusunan data informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian, pengaturan tata tempat dan tata acara serta kegiatan kehumasan dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

keprotokolan lain sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

8. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

C. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai uraian tugas:

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta, dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan memeriksa berkas yang diajukan kepala desa sebagai bahan konsultasi kepada pimpinan guna disahkan oleh pimpinan;
5. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan melalui fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, fasilitasi pemberian tunjangan perangkat desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;

https://jdih.pemalangkab.go.id

6. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Seksi Tata Pemerintahan meliputi data monografi desa, data perangkat desa dan data terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
8. Menyusun konsep motivasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

D. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, keagamaan, pembinaan kesehatan, keluarga berencana, organisasi perempuan, pendidikan, pemuda dan olahraga dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan sosial desa melalui fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pembangunan desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjaama desa dengan pihak ketiga, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, koordinasi pendampingan

https://jdih.pemalangkab.go.id

desa, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial guna tertib administrasi dan kelancaran dan penyelenggaraan pemerintahan desa;

5. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dengan melibatkan stakeholder terkait demi tercapainya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran;
6. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan dan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawabkan kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

E. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan meliputi fasilitasi pengaduan masyarakat, kejadian musibag, bencana umum atau kejadian luar biasa lainnya serta upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lainnya dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan pemuka agama/tokoh masyarakat serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan

https://jdih.pemalangkab.go.id

perundang-undangan guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum;

4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau desa/kelurahan serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna tegaknya peraturan;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah yang ada di wilayah kecamatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dan/atau swasta dan/atau pihak terkait lainnya sesuai dengan prosesur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keamanan dan terpeliharanya prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah;
6. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan yang bergerak di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
7. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kebutuhan informasi publik;
9. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

F. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;

https://jdih.pemalangkab.go.id

2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan kegiatan koordinasi terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan dan kabupaten, pemerintah desa/kelurahan, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep rencana operasional dan standar pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
5. Melaksanakan kegiatan fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan di bidang perizinan, non perizinan, administrasi pertanahan dan pelayanan administrasi lainnya sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dan pemeriksaan dokumen/berkas permohonan, cek lokasi apabila disyaratkan, pengesahan hingga penyampaian kembali dokumen/berkas kepada pemohon guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
6. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan prosedur dan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
7. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tercapainya kepuasan masyarakat;
8. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
9. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
10. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya Kecamatan Pulosari sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

1) Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Jumlah pegawai di Kecamatan Pulosari dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyakatan sosial tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2 1
Data Pegawai Kecamatan Pulosari

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Golongan				Jumlah
				I	II	III	IV	
1	Camat	1					1	1
2	Sekcam	1				1		1
3	Kasubag	1				1		1
4	Kasi Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
5	Penata Kelola Pemerintahan	3	-	-	-	3	-	3
6	Penelaah Teknis Kebijakan	1	-	-	-	1	-	1
7	Pengolah Data dan Informasi	1	-	-	1	-	-	1
8	Pengadministrasi Perkantoran	4	1	-	3	2	-	5
9	Operator Layanan Operasional 3	1	-	-	1	-	-	1
Jumlah		13	1		5	8	1	14

Sumber : Sekretariat Kecamatan Pulosari*, 2025*

Berdasarkan data Daftar Urut Kepangkatan (DUK) per Mei 2025, jumlah pegawai yang bertugas di Kecamatan Pulosari adalah sebanyak **14 orang**. Komposisi pegawai ini mencerminkan struktur organisasi dan kapasitas sumber daya manusia yang tersedia dalam mendukung pelayanan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kecamatan

Pegawai Kecamatan Pulosari didominasi oleh laki-laki, yaitu sebanyak 13 orang (93%), sementara pegawai perempuan hanya berjumlah 1 orang (7%), yakni pada jabatan Pengadministrasi Perkantoran. Ketimpangan gender ini menunjukkan bahwa belum tercipta representasi perempuan yang seimbang dalam jabatan struktural maupun fungsional di Kecamatan Pulosari.

Untuk jabatan Kepala Seksi (Kasi) belum terisi, yang seharusnya terdiri dari 3 posisi (Kasi Pemerintahan, Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Kasi Pemberdayaan Desa). Hal ini

https://jdih.pemalangkab.go.id

menunjukkan kekosongan jabatan struktural eselon IV yang perlu segera diisi agar fungsi koordinatif kecamatan dapat berjalan optimal

Tabel 2.2.
Data Pegawai Berdasar Diklat Kepemimpinan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) / Diklatpim III	-	-	-
2	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) /Diklatpim IV	2	2	-
Jumlah		2	2	2

Sumber : Sekretariat Kecamatan Pulosari*, 2025*

Jumlah pegawai berdasarkan diklat kepemimpinan pada Kecamatan Pulosari, yaitu 2 orang sudah mengikuti Diklatpim Diklatpim IV, dan 1 orang belum mengikuti diklat kepemimpinan, hal ini disebabkan masih menunggu penyelenggaraan diklat dari instansi yang berwenang.

Tabel 2.3.
Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pasca Sarjana (S2)	1	1	-
2	Sarjana (S1)	4	4	-
3	Diploma	1	1	-
4	SLTA	8	7	1
5	SLTP	-	-	-
6	SD	-	-	-
Jumlah		14	13	1

Sumber : Sekretariat Kecamatan Pulosari*, 2021*

Berdasarkan data pendidikan terakhir yang dimiliki oleh pegawai di Kecamatan Pulosari per Mei 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum kualifikasi pendidikan pegawai berada pada jenjang menengah hingga tinggi, jumlah pegawai Kecamatan Pulosari berdasar tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S2) sebanyak 1 orang, Sarjana (S1) sebanyak 4 orang, Diploma sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 8 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara kualitas SDM di Kecamatan Pulosari belum memadai, yaitu dengan dominansi berpendidikan SLTA sebanyak 57%.

Dari segi distribusi gender terhadap jenjang pendidikan, tampak bahwa seluruh pegawai berpendidikan tinggi (S2, S1, dan D-III) merupakan laki-laki, satu-satunya pegawai perempuan berada pada jenjang pendidikan SLTA, menempati jabatan sebagai

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pengadministrasi Perkantoran. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam hal kesetaraan akses pendidikan tinggi bagi pegawai perempuan, serta potensi pengembangan SDM melalui peningkatan kapasitas pendidikan formal

Tabel 2.4.
Data Pegawai Berdasar Tingkat Eselon

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	IIIA	1	1	-
2	IIIB	1	1	-
3	IVA	-	-	-
4	IVB	1	1	-
Jumlah		3	7	-

Sumber : Sekretariat Kecamatan Pulosari*, 2025*

Jumlah pegawai Kecamatan Pulosari berdasarkan tingkat eselon, yaitu Eselon IIIA sebanyak 1 orang, Eselon IIIB sebanyak 1 orang, Eselon IVB sebanyak 1 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Kecamatan Pulosari berdasarkan tingkat eselon dominan esselon IVA yaitu sebanyak 50%.

2) Sarana dan Prasarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Kecamatan Pulosari dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5.
Inventaris Aset Kecamatan Pulosari

No	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Jumlah Harga (Rp)
					Baik	Sedang	Rusak	
1	**01**		**Tanah**					
		01	Tanah	3.770				113.100.000,00
			Jumlah KIB A	*3.770*	*3.770*	-	-	*113.100.000,00*
2	**01**		**Peralatan dan Mesin**					
		02	Alat-alat Besar	-	-	-	-	-
		03	Alat-alat Angkutan	16	14	-	2	543.566.408,00
		04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1	1	-	-	1.800.000,00
		05	Alat Pertanian	1	1	-	-	1.000.000,00
		06	Alat Kantor & Rumah Tangga	119	109	7	3	279.115.652,00
		07	Alat Studia & Alat Komunikasi	8	8	-	-	39.421.571,00
		08	Alat-alat Kedokteran	-	-	-	-	-
		09	Alat Laboratorium	3	3	-	-	24.000.000,00
		10	Alat-alat persenjataan/keamanan	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Jumlah Harga (Rp)
					Baik	Sedang	Rusak	
			Jumlah KIB B	*148*	*136*	*7*	*5*	*1.056.124.851,00*
3	**03**		**Gedung dan Bangunan**					
		11	Bangunan Gedung	8	7	-	1	1.638.365.000,00
		12	Monumen	-	-	-	-	-
		13	Tugu Titik Kontrol/Pasti	2	2	-	-	224.350.000,00
			Jumlah KIB C	*10*	*9*	-	*1*	*1.862.715.000,00*
4	**04**		**Jalan, Irigasi dan Jaringan**					
		14	Jalan & Jembatan	-	-	-	-	
		15	Bangunan Air/Irigasi	-	-	-	-	
		16	Instalasi	-	-	-	-	
		17	Jaringan	6	-	-	-	7.000.000,00
			Jumlah KIB D	*6*	*6*	-	-	*7.000.000,00*
5	**05**		**Aset Tetap Lainnya**					
		18	Buku dan Perpustakaan	-	-	-	-	-
		19	Barang Bercorak Kebudayaan	-	-	-	-	-
		20	Hewan, Ternak dan Tanaman	-	-	-	-	-
			Jumlah KIB E	-	-	-	-	-
6	**06**		**Konstruksi dalam Pengerjaan**	-	-	-	-	-
			Jumlah KIB F	-	-	-	-	-
			Jumlah Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.038.939.851,00**

Sumber : Sekretariat Kecamatan Pulosari*, 2021*

3) Administrasi Kewilayahan

Terdapat 12 desa di Kecamatan Pulosari dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.6.
Administrasi Kewilayahan Kecamatan Pulosari

No	Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT	Jumlah Perangkat Desa	Jumlah Linmas	Ket
1	Clekatakan	5	5	23	13	11	
2	Batursari	4	4	16	12	10	
3	Penakir	5	10	28	13	10	
4	Gunungsari	4	4	27	12	28	
5	Jurangmangu	2	2	7	10	11	
6	Gambuhan	4	4	32	12	20	
7	Karangsari	4	4	30	12	30	
8	Nyalembeng	2	3	19	10	14	
9	Pulosari	5	9	41	13	10	
10	Pagenteran	5	2	12	11	12	
11	Siremeng	4	4	28	12	10	
12	Cikendung	3	3	28	11	24	
Jumlah		47	54	291	141	190	

Sumber : Sekretariat Kecamatan Pulosari*, 2025*

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.1.3. Kinerja Penyelanggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran Pelayanan Kecamatan Pulosari Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pulosari

No	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun Ke -				Rasio Capaian Tahun Ke-			
						2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks		√		78	79	79	80	80	78,66	86,95	81,77	83,47	100,85	110,06	103,51	104,34
2	Cakupan layanan kecamatan	%		√		93,888	93,89	93,89	93,89	93,89	91,666	84,68	91,67	92,89	97,63	90,19	97,63	98,94
3	Persentase pelayanan publik yang tersedia	%				94,44	94,44	94,44	94,44	94,44	83,33	94,24	83,33	89,47	88,24	99,79	88,24	94,74
4	Persentase masyarakat desa yang aktif	%				100	100	100	100	100	100	54,17	100	100	100,00	54,17	100,00	100,00
5	Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%				75	75	75	75	75	75	75	75	75	100,00	100,00	100,00	100,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

Selama kurun waktu tahun 2021 hingga 2024, Kecamatan Pulosari menunjukkan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat berdasarkan indikator-indikator utama yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Pulosari. Dari tujuh indikator kunci yang diukur, sebagian besar menunjukkan tren positif, terutama dalam hal kepuasan masyarakat, cakupan layanan, serta penyelesaian gangguan trantibum dan konflik sosial.

1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meningkat dari 78,66 pada tahun 2021 menjadi 83,47 pada tahun 2024, dengan rasio capaian yang melampaui target.
2) Cakupan layanan kecamatan mencapai 92,89% pada 2024, mendekati target 93,89%, mencerminkan peningkatan luas dan jenis layanan yang tersedia bagi masyarakat.
3) Persentase pelayanan publik yang tersedia fluktuatif, dengan capaian 89,47% pada tahun 2024, menunjukkan adanya kebutuhan peningkatan konsistensi penyediaan layanan.
4) Partisipasi masyarakat desa, serta penyelesaian gangguan trantibum dan potensi konflik, berhasil dipertahankan pada tingkat maksimal (100%) dalam tiga tahun terakhir.
5) Indikator desa bertata kelola baik stagnan pada angka 75%, menandakan perlunya peningkatan kapasitas pemerintahan desa.

Secara umum, kualitas pelayanan Kecamatan Pulosari telah menunjukkan kemajuan yang menggembirakan, namun tetap menyisakan beberapa tantangan yang memerlukan perhatian strategis.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu:

1) Tingkat kinerja aparatur kecamatan sangat dipengaruhi oleh kompetensi teknis, kedisiplinan, serta etika pelayanan;
2) Peran aktif dan komitmen Camat, Sekretaris Kecamatan, dan para kasi/subbag sangat mempengaruhi arah kebijakan internal, budaya kerja, serta motivasi tim dalam melaksanakan tugas pelayanan;
3) Tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pelayanan, baik sebagai penerima layanan maupun sebagai pengawas sosial, turut memengaruhi kepuasan dan kualitas hasil layanan;
4) Sinergi antara kecamatan dengan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, serta instansi vertikal seperti kepolisian dan TNI menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial dan pelayanan publik;
5) Keberhasilan pelayanan juga bergantung pada konsistensi pelimpahan kewenangan, kebijakan pelayanan, serta integrasi perencanaan antar tingkatan pemerintahan;
6) Letak Kecamatan Pulosari yang berada di wilayah dataran tinggi turut memengaruhi aksesibilitas masyarakat terhadap layanan, terutama dari desa-desa yang letaknya terpencil atau belum memiliki konektivitas jalan dan jaringan komunikasi yang optimal.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.7.
Anggaran dan Realisasi Pelayanan Kecamatan Pulosari

No	Program	Anggaran Tahun Ke -				Realisasi Anggaran Tahun Ke -				Rasioan Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota	2.803.680.600	2.739.678.500	2.466.318.250	2.634.273.500	2.707.255.072	2.509.182.301	2.418.576.731	2.438.524.095	96,56	91,59	98,06	92,57	-6,04	-9,93
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	53.242.100	24.015.500	13.427.000	9.652.000	53.242.100	24.015.500	13.427.000	9.652.000	100	100	100,00	100,00	- 81,87	-81,87
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	56.382.500	55.690.000	47.360.000	67.137.000	56.382.500	39.221.600	47.360.000	67.137.000	100	70,43	100,00	100,00	19,07	19,07
4	Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	17.775.000	2.542.000	5.775.000	34.678.000	17.775.000	2.542.000	5.775.000	32.278.000	100	100	100,00	93,08	95,09	81,59
5	Program penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	14.400.000	30.600.000	31.601.000	145.265.000	14.400.000	53.828.000	31.601.000	145.230.000	100,00	175,91	100,00	99,98	908,78	908,54
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	149.970.800	136.017.000	167.319.000	93.393.500	149.960.800	169.500.000	166.571.000	90.049.500	99,99	124,62	99,55	96,42	-37,73	-39,95
	Jumlah	**3.095.451.000**	**2.988.543.000**	**2.731.800.250**	**2.984.399.000**	**2.999.015.472**	**2.798.289.401**	**2.683.310.731**	**2.782.870.595**	**96,88**	**93,63**	**98,22**	**93,25**	-3,59	-7,21

https://jdih.pemalangkab.go.id

Selama periode 2021–2024, terdapat fluktuasi signifikan dalam alokasi anggaran dan realisasi program-program pemerintahan di Kecamatan Pulosari. Beberapa program mengalami peningkatan signifikan, sedangkan sebagian lainnya menunjukkan penurunan tajam, baik dari sisi anggaran maupun realisasi

Rata-rata Pertumbuhan Anggaran -3,59%, Rata-rata Pertumbuhan Realisasi -7,21%, Penurunan secara agregat mengindikasikan kecenderungan penghematan atau penyederhanaan kegiatan. Meski demikian, program strategis seperti urusan pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat masih mendapatkan perhatian khusus.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi

- Kebijakan Penyesuaian Anggaran: Efisiensi belanja daerah dan refocusing belanja memengaruhi besaran alokasi.
- Prioritas Pembangunan: Program-program dengan hasil langsung terhadap masyarakat lebih diprioritaskan (misalnya pemberdayaan dan keamanan).
- Pelimpahan Kewenangan Camat: Terjadi peningkatan signifikan pada program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dikarenakan adanya Kegiatan Festival Wong Gunung memengaruhi lonjakan anggaran.

2.2. Identifikasi Permasalah dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Identifikasi Permasalahan

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Kecamatan Pulosari sebagai PD mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Pulosari dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.8.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pulosari

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia	Waktu pelayanan belum sesuai standar yang diharapkan masyarakat	Kurangnya standar operasional prosedur (SOP) yang terimplementasi efektif
			Keterbatasan Sumberdaya Manusia
			Kurangnya sarana prasarana pelayanan yang ramah masyarakat
		Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat	Minimnya pedoman teknis dan supervisi dari perangkat daerah terkait, serta keterbatasan sumber daya pendukung di kecamatan
		Sistem layanan belum sepenuhnya berbasis digital	Infrastruktur TIK belum memadai

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Kurangnya literasi digital pegawai maupun masyarakat
2	Belum optimalnya desa bertata kelola pemerintahan baik	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dan kapasitas pendamping desa masih terbatas
			Monitoring tidak berjalan rutin
			Keterbatasan pemahaman perangkat desa tentang tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas
3	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja	Belum tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Keterbatasan SDM dalam penyusunan dokumen SAKIP
			Tidak konsistennya pelaksanaan monitoring dan evaluasi
			Pemenuhan data dukung belum maksimal dan tertata rapi
		Belum optimalnya pengadministrasian keuangan	Miniminya pemahanan tentang pengadministrasian keuangan oleh pegawai
			Keterbatasan SDM Kecamatan Pulosari dalam memahami penyusunan Perancanaan Anggaran dan Pertanggungjawaban Anggaran
4	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Belum optimalnya pengadministrasian Barang Milik Daerah (BMD)	Tidak tersedianya sistem informasi BMD yang valid dan terbarukan
			Keterbatasan kompetensi aparatur dalam pengelolaan aset
		Masih rendahnya kapasitas SDM	Minimnya pelatihan dan pembinaan teknis
			Rekrutmen tidak mempertimbangkan kompetensi teknis
			Terbatasnya anggaran peningkatan SDM
		Belum optimalnya penyediaan layanan administrasi umum	Prosedur administrasi terlalu panjang dan tidak efisien
			Kurangnya fasilitas dasar pelayanan dan Minimnya koordinasi antar unit kerja
		Belum optimalnya penyediaan jasa penunjang untuk memperlancar pelaksanaan tugas	Anggaran operasional sangat terbatas
			Tidak ada perencanaan kebutuhan jasa penunjang
		Belum optimalnya pemeliharaan BMD	Tidak adanya jadwal dan standar pemeliharaan
			Ketiadaan alokasi dana pemeliharaan yang cukup
			Kurangnya pengawasan terhadap penggunaan BMD
5	Belum Optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan desa	Kurangnya sosialisasi dan komunikasi efektif antar pemangku kepentingan
			Budaya Partisipatif yang belum terbentuk
		Rendahnya pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam kegiatan pemberdayaan	Rendahnya literasi digital masyarakat dan aparatur
			Akses terhadap sarana prasarana TIK masih terbatas
		Kurangnya kapasitas SDM dalam Pendampingan pemberdayaan	Minimnya pelatihan teknis dan pendampinga
			Tidak adanya mekanisme penguatan kapasitas berkelanjutan

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.2.2. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berlangsung dalam jangka menengah / panjang (Permendagri 86 tahun 2017). Isu strategis Kecamatan Pulosari dirumuskan dengan mempertimbangkan isu strategis global, Nasional dan Provinsi dan memperhatikan potensi, peluang dan tantangan yang ada di Kecamatan Pulosari selama kurun waktu tahun 2025 – 2029. Isu strategis Global, Nasional dan Provisi Jawa Tengah dan Isu strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pemalang untuk Kecamatan Pulosari adalah sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis Kecamatan Pulosari
				Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	
1	- Lahan Pertanian yang luas	- Alih fungsi lahan pertanian untuk perumahan - Belum terwujudnya ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Pulosari		- Ketahanan Pangan - Pola Konsumsi dan produksi berkelanjutan	- Belum optimalnya Teknologi Pertanian	- Ketahanan Pangan	Kesadaran, peran serta, dan ketahanan keluarga dalam mewujudkan keluarga yang sehat, berdaya, mandiri, dan berkualitas
2	Desa adat dengan tradisi kuat (Ruat Agung Banyu Panguripan, sedekah bumi, dll.)	Lemahnya pengelolaan dan dokumentasi budaya lokal		Hilangnya warisan budaya tak benda	Revitalisasi budaya daerah	Harmonisasi pembangunan dan budaya	Lemahnya pengelolaan dan dokumentasi budaya lokal serta tradisi masyarakat adat
3	Kapasitas Linmas dan kelembagaan desa	Keterbatasan SDM, koordinasi, dan minimnya sarpras keamanan		Kesiapsiagaan terhadap bencana	Sistem peringatan dini berbasis masyarakat	Potensi longsor/banjir lereng pegunungan	Terbatasnya kapasitas SDM, koordinasi, dan sarpras Linmas dalam mendukung ketahanan sosial dan penanggulangan bencana
4	Semangat gotong royong masyarakat	Partisipasi masyarakat belum terlembaga dalam musrenbang dan pengawasan		Good governance	Reformasi birokrasi partisipatif	Integrasi perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	Belum terlembaganya partisipasi masyarakat dalam musrenbang, pengawasan, dan pembangunan desa.

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis Kecamatan Pulosari
				Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	
6	Tersedianya ruang publik desa dan kecamatan	Belum dimanfaatkan sebagai pusat layanan dan interaksi sosial		Kota dan permukiman inklusif (SDG 11)	Penguatan peran ruang publik	Kurangnya sarana interaksi masyarakat	Rendahnya pemanfaatan ruang publik desa dan kecamatan sebagai pusat layanan dan interaksi sosial
7	Akses teknologi dan digitalisasi (meski terbatas)	Rendahnya literasi digital aparatur dan masyarakat		Transformasi digital inklusif	SPBE dan layanan digital	Kesenjangan akses internet di wilayah pegunungan	Rendahnya literasi digital dan kesenjangan akses teknologi, khususnya di wilayah pegunungan

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB III

TUJUAN,SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Kecamatan Pulosari dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang pelayanan publik, maka Kecamatan Pulosari harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Kecamatan Pulosari secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat secara umum.

3.1. Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Pulosari selama tahun 2025–2029 adalah "**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan. Kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan**". Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pulosari sebagai PD yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dengan tujuan **Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan. Kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan**. Tujuan tersebut diukur dengan indikator jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan.

3.1.2. Sasaran

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Pulosari dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Pulosari selama tahun 2025-2029, adalah "**Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat**". Sasaran tersebut diukur dengan indikator :

1. Nilai SKM adalah Survei Kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan Pulosari semester I dan II pada tahun berjalan.Rumus Nilai SKM adalah = Total dari nilai persepsi per unsur x nilai penimbang
2. Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri dengan rumus jumlah desa mandiri dibagi jumlah seluruh desa di Kecamatan x 100%

https://jdih.pemalangkab.go.id

Adapun teknik merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pulosari dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Teknis Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pulosari

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntable, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di Wilayah Kecamatan		Prosentase meningkatnya jumlah Desa Mandiri (%)	16,67	25,00	33,33	41,67	50,00	58,33	
		Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas perangkat daerah	Nilai SKM (Indeks)	87,00	87,25	87,50	87,75	88,00	88,25	
			Nilai SAKIP OPD (Nilai)	67,41	70,5	71,5	72,5	73,5	75,5	

https://jdih.pemalangkab.go.id

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1. Strategi

Strategi yang dilakukan Kecamatan Pulosari untuk mencapai tujuan dan Sasaran Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM Kecamatan Pulosari

   Meningkatkan kualitas SDM Kecamatan Pulosari dengan cara sebagai berikut :

   a. Mengusulkan pegawai Kecamatan Pulosari ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang untuk mengikuti pelatihan, bimbingan teknis maupun sosialisasi yang dapat meningkatkan kompetensi pegawai Kecamatan Pulosari
   b. Mengadakan Pelatihan/Sosialisasi/ Bimbingan Teknis intern di Kecamatan Pulosari kepada Pegawai Kecamatan Pulosari
   c. Mengadakan pelatihan digitalisasi dalam pemberian layanan pemerintahan
2. Meningkatnya kualitas pembangunan desa dan kawasan perdesaan
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hidup berdampingan secara harmonis dan kondusif
4. Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntable, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik

3.2.2. Penahapan Pembangunan

Penahapan pembangunan Kecamatan Pulosari adalah prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pulosari, Penahapan Renstra Kecamatan Pulosari dapat disajikan pada tabel di bawah ini

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Kecamatan Pulosari

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Memperkuat tata kelola pemerintahan, kelembagaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerintahan kecamatan yang partisipatif dan responsif.	Penguatan tata kelola pemerintahan dan transformasi birokrasi melalui digitalisasi pelayanan publik, pengembangan potensi wisata dan ekonomi lokal, serta pemberdayaan masyarakat berbasis potensi unggulan daerah.	Penguatan tata kelola dan kelembagaan desa untuk mendorong sektor unggulan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan keamanan, investasi, dan perencanaan responsif gender.	Mewujudkan good and clean government melalui pemantapan maturitas SPIP menuju integritas dan anti korupsi, digitalisasi pelayanan publik, serta penguatan penanganan kemiskinan dan peningkatan kualitas perencanaan	Peningkatan kualitas birokrasi yang akuntabel dan pelayanan publik yang prima, serta pemerataan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan ekonomi desa

https://jdih.pemalangkab.go.id

			penanggulangan kemiskinan	

3.2.3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategis yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025 – 2030 memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Pulosari adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pulosari

NO	OPERASIONALISASI NPSK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN PULOSARI	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum	Peningkatan kualitas perencanaan daerah di fokuskan pada transparansi, akuntabilitas perencanaan, dan sinergitas dok pusat dan propinsi Peningkatan kualitas digitalisai pelayanan pemerintahan di fokuskan pada peningkatan tata kelola arsitektur SPBE, mendorong kualitas SMART City dan kualitas layanan aduan Peningkatan kualitas pelayanan publik di fokuskan pada pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan kepuasan pada masyarakat	Penguatan sistem perencanaan, pelayananan pemerintahan dan pengukuran kinerja	
2	Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Pengembangan industri kecil menengah dengan penguatan sentra/kluster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital	Pengembangan pelatihan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan UMKM	
3	Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan konduktivitas wilayah dengan peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama dan pemahaman wawasan kebangsaan	Meningkatkan pelatihan limas dan pembinaan masyarakat terkait dengan sistem pengaduan maupun keamanan dan ketertiban	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	OPERASIONALISASI NPSK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN PULOSARI	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa di fokuskan pada peningkatan kualitas eprocurements, kualitas sarana dan prasarana	Penguatan koordinasi dan supervisi dar	
5	Membina dan Mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan / atau kelurahan	Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan difokuskan pada peningktan indeks desa, peningkatan peran BUMDes dalam pembangunan daerah, peningkatan pembinaan dan pengawasan kecamatan dalam pembangunan desa/kelurahan dan pengembangan kerjasama antar dan pengembangan kerjasama antar desa	Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraa n kegiatan desa dan peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pulosari yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2029 :

A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
   1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
      a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
      b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerjan Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
      a. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
      b. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
   3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
      a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
      b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

B. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
   1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
      a. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
      b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
   2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
      a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
      b. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
   3. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
      a. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
      b. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
      c. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
      d. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga

C. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

https://jdih.pemalangkab.go.id

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
    a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
    b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
    a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

D. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
    a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
    b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

E. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
    b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
    c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
    d. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
    e. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
    f. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
    g. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
    h. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
    i. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
    j. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
    k. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
    l. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
    m. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
    n. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
    o. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

F. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

https://jdih.pemalangkab.go.id

c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
h. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
   d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
   b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Pengadaan Mebel
   b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   b. Pemeliharaan Mebel
   c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pulosari menjabarkan tujuan dan sasaran strategis kedalam program, kegiatan, sub kegiatan lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanan Kecamatan Pulosari. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Kecamatan Pulosari serta teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pulosari seperti Tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pulosari

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Keterangan
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan**				**Prosentase meningkatnya jumlah Desa Mandiri**	
		Meningkatnnya kualitas Pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun**	
				Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sesuai ketentuan	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun**	
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Keterangan
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat dan SOP yang tersusun**	
					Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai ketentuan	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang menunjang pelaksanaan tugas**	
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Keterangan
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif**	
				Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa sesuai ketentuan	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Laporan/Dokumen kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan**	
					Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi**	
					Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	
					Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Keterangan
				Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sesuai ketentuan	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Jumlah pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang terlaksana sesuai ketentuan**	
					Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
					Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Keterangan
				Terlaksananya koordinasi upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun**	
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
				Terselenggaranya koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai ketentuan	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tersusun (Laporan)**	
					Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Keterangan
			Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani**	
				Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah sesuai ketentuan	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun**	
					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya pembinaan dan		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**	**Jumlah desa yang naik statusnya**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Keterangan
			pengawasan pemerintahan Desa		**PEMERINTAHAN DESA**		
				Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sesuai ketentuan	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan pemerintahan desa yang selesai tepat waktu**	
					Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Keterangan
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
					Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
					Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
					Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
					Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Keterangan
					Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
					Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
					Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi**	
						Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi	
				Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai regulasi	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi**	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Keterangan
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Keterangan
					Perencanaan Perangkat Daerah		
				Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi**	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Keterangan
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi**	
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi**	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Keterangan
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**	
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
				Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Keterangan
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Bidang urusan / program / outcome/ kegiatan / sub kegiatan output	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	Base Line Tahun 2024										Keterangan
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan	**Prosentase meningkatnya jumlah Desa Mandiri**	**%**	**16,67**	**25**	**2.883.914.000**	**33,33**	**2.888.914.000**	**41,67**	**2.888.914.000**	**50**	**2.888.914.000**	**58,33**	**2.888.914.000**	
Meningkatnnya kualitas Pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	**Nilai SKM**	**Indeks**	**83,47**	**87,25**	**2.883.914.000**	**87,5**	**2.888.914.000**	**87,75**	**2.888.914.000**	**88**	**2.888.914.000**	**88,25**	**2.888.914.000**	
	Nilai SAKIP OPD	**Nilai**	**60,82**											
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun**	**%**	**83,33**	**83,33**	**22.250.000**	**83,33**	**22.250.000**	**83,33**	**22.250.000**	**83,33**	**22.250.000**	**83,33**	**22.250.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang urusan / program / outcome/ kegiatan / sub kegiatan output	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	Base Line Tahun 2024										Keterangan
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun**	**Laporan/ dokumen**	**12**	**12**	**8.500.000**	**12**	**8.500.000**	**12**	**8.500.000**	**12**	**8.500.000**	**12**	**8.500.000**	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Laporan	4	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	4	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat dan SOP yang tersusun**	**Laporan/ dokumen**	**2**	**2**	**8.200.000**	**2**	**8.200.000**	**2**	**8.200.000**	**2**	**8.200.000**	**2**	**8.200.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang urusan / program / outcome/ kegiatan / sub kegiatan output	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	Base Line Tahun 2024										Keterangan
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	Dokumen	1	1	5.200.000	1	5.200.000	1	5.200.000	1	5.200.000	1	5.200.000	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang menunjang pelaksanaan tugas**	**Kegiatan**	**12**	**12**	**5.550.000**	**12**	**5.550.000**	**12**	**5.550.000**	**12**	**5.550.000**	**12**	**5.550.000**	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	12	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang urusan / program / outcome/ kegiatan / sub kegiatan output	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	Base Line Tahun 2024										Keterangan
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	4	12	3.050.000	12	3.050.000	12	3.050.000	12	3.050.000	12	3.050.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif**		**94,70**	**95,16**	**72.747.500**	**95,39**	**72.747.500**	**95,62**	**72.747.500**	**95,85**	**72.747.500**	**96,08**	**72.747.500**	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Laporan/Dokumen kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan**	**Laporan/ dokumen**	**13**	**13**	**43.075.000**	**13**	**43.075.000**	**13**	**43.075.000**	**13**	**43.075.000**	**13**	**43.075.000**	
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	1	1	33.325.000	1	33.325.000	1	33.325.000	1	33.325.000	1	33.325.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang urusan / program / outcome/ kegiatan / sub kegiatan output	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	Base Line Tahun 2024										Keterangan
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	9.750.000	12	9.750.000	12	9.750.000	12	9.750.000	12	9.750.000	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**1**		**15.197.500**		**15.197.500**		**15.197.500**		**15.197.500**		**15.197.500**	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	1	1	10.197.500	1	10.197.500	1	10.197.500	1	10.197.500	1	10.197.500	
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Jumlah pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang terlaksana sesuai ketentuan**	**Kegiatan**	**-**	**4**	**14.475.000**		**14.475.000**		**14.475.000**		**14.475.000**		**14.475.000**	
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	-	40	10.000.000	40	10.000.000	40	10.000.000	40	10.000.000	40	10.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang urusan / program / outcome/ kegiatan / sub kegiatan output	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	Base Line Tahun 2024										Keterangan
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	-	30	2.375.000	30	2.375.000	30	2.375.000	30	2.375.000	30	2.375.000	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	-	30	2.100.000	30	2.100.000	30	2.100.000	30	2.100.000	30	2.100.000	
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani**	**%**	**100,00**	**100,00**	**10.000.000**	**100,00**	**15.000.000**	**100,00**	**15.000.000**	**100,00**	**15.000.000**	**100,00**	**15.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang urusan / program / outcome/ kegiatan / sub kegiatan output	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	Base Line Tahun 2024										Keterangan
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun**	**Laporan**	**12**	**12**	**10.000.000**	**12**	**10.000.000**	**12**	**10.000.000**	**12**	**10.000.000**	**12**	**10.000.000**	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	4	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tersusun (Laporan)**	**Laporan**	**-**		**-**	**6**	**5.000.000**	**6**	**5.000.000**	**6**	**5.000.000**	**6**	**5.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang urusan / program / outcome/ kegiatan / sub kegiatan output	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	Base Line Tahun 2024										Keterangan
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	-			6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani**	**%**	**100,00**		**152.825.000**		**152.825.000**		**152.825.000**		**152.825.000**		**152.825.000**	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun**	**Dokumen**	**12**	**12**	**152.825.000**		**152.825.000**		**152.825.000**		**152.825.000**		**152.825.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang urusan / program / outcome/ kegiatan / sub kegiatan output	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	Base Line Tahun 2024										Keterangan
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	200	200	143.575.000	200	143.575.000	200	143.575.000	200	143.575.000	200	143.575.000	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12	12	9.250.000	12	9.250.000	12	9.250.000	12	9.250.000	12	9.250.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang urusan / program / outcome/ kegiatan / sub kegiatan output	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	Base Line Tahun 2024										Keterangan
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Jumlah desa yang naik statusnya**			**33,33**	**62.640.000**	**41,67**	**62.640.000**	**50,00**	**62.640.000**	**58,33**	**62.640.000**	**66,67**	**62.640.000**	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan pemerintahan desa yang selesai tepat waktu**	**Laporan/ dokumen**	**Laporan/ dokumen**	**121**	**62.640.000**	**121**	**62.640.000**	**121**	**62.640.000**	**121**	**62.640.000**	**121**	**62.640.000**	
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	12	12	6.100.000	12	6.100.000	12	6.100.000	12	6.100.000	12	6.100.000	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	12	12	9.600.000	12	9.600.000	12	9.600.000	12	9.600.000	12	9.600.000	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	12	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang urusan / program / outcome/ kegiatan / sub kegiatan output	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	Base Line Tahun 2024										Keterangan
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	12	2	7.200.000	2	7.200.000	2	7.200.000	2	7.200.000	2	7.200.000	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	12	8	7.750.000	8	7.750.000	8	7.750.000	8	7.750.000	8	7.750.000	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	12	12	4.300.000	12	4.300.000	12	4.300.000	12	4.300.000	12	4.300.000	
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	12	5	1.440.000	5	1.440.000	5	1.440.000	5	1.440.000	5	1.440.000	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	12	12	4.050.000	12	4.050.000	12	4.050.000	12	4.050.000	12	4.050.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang urusan / program / outcome/ kegiatan / sub kegiatan output	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	Base Line Tahun 2024										Keterangan
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	12	1	3.600.000	1	3.600.000	1	3.600.000	1	3.600.000	1	3.600.000	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	12	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	12	1	2.600.000	1	2.600.000	1	2.600.000	1	2.600.000	1	2.600.000	
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen	12	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	12	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang urusan / program / outcome/ kegiatan / sub kegiatan output	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	Base Line Tahun 2024										Keterangan
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	12	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	6	3.000.000	6	3.000.000	6	3.000.000	6	3.000.000	6	3.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi**	**%**	**100**	**100**	**2.563.451.500**	**100**	**2.563.451.500**	**100**	**2.563.451.500**	**100**	**2.563.451.500**	**100**	**2.563.451.500**	
	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi**	**%**	**100**	**100**	**38.680.000**	**100**	**38.680.000**	**100**	**38.680.000**	**100**	**38.680.000**	**100**	**38.680.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang urusan / program / outcome/ kegiatan / sub kegiatan output	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	Base Line Tahun 2024										Keterangan
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	10.450.000	2	10.450.000	2	10.450.000	2	10.450.000	2	10.450.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1	3.880.000	1	3.880.000	1	3.880.000	1	3.880.000	1	3.880.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1	2.200.000	1	2.200.000	1	2.200.000	1	2.200.000	1	2.200.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang urusan / program / outcome/ kegiatan / sub kegiatan output	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	Base Line Tahun 2024										Keterangan
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	4	7.200.000	4	7.200.000	4	7.200.000	4	7.200.000	4	7.200.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4	6.400.000	4	6.400.000	4	6.400.000	4	6.400.000	4	6.400.000	
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	1	5.550.000	1	5.550.000	1	5.550.000	1	5.550.000	1	5.550.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi**				**2.000.518.000**		**2.000.518.000**		**2.000.518.000**		**2.000.518.000**		**2.000.518.000**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Orang/ bulan	20	1.989.818.000	20	1.989.818.000	20	1.989.818.000	20	1.989.818.000	20	1.989.818.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang urusan / program / outcome/ kegiatan / sub kegiatan output	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	Base Line Tahun 2024										Keterangan
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	-	1	2.200.000	1	2.200.000	1	2.200.000	1	2.200.000	1	2.200.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	-	12	7.800.000	12	7.800.000	12	7.800.000	12	7.800.000	12	7.800.000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	Laporan	-	1	700.000	1	700.000	1	700.000	1	700.000	1	700.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi**	*%*	*100*	*100*	*34.653.000*	*100*	*34.653.000*	*100*	*34.653.000*	*100*	*34.653.000*	*100*	*34.653.000*	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	40	3.000.000	40	3.000.000	40	3.000.000	40	3.000.000	40	3.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang urusan / program / outcome/ kegiatan / sub kegiatan output	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	Base Line Tahun 2024										Keterangan
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	11	31.653.000	11	31.653.000	11	31.653.000	11	31.653.000	11	31.653.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi**				***156.909.500***		***156.909.500***		***156.909.500***		***156.909.500***		***156.909.500***	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	6	4.998.000	6	4.998.000	6	4.998.000	6	4.998.000	6	4.998.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	12	94.171.500	12	94.171.500	12	94.171.500	12	94.171.500	12	94.171.500	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	12	16.440.000	12	16.440.000	12	16.440.000	12	16.440.000	12	16.440.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	12	1.680.000	12	1.680.000	12	1.680.000	12	1.680.000	12	1.680.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang urusan / program / outcome/ kegiatan / sub kegiatan output	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	Base Line Tahun 2024										Keterangan
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	100	39.620.000	100	39.620.000	100	39.620.000	100	39.620.000	100	39.620.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**				***32.819.000***		***32.819.000***		***32.819.000***		***32.819.000***		***32.819.000***	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit		32.819.000		32.819.000		32.819.000		32.819.000		32.819.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit											
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				***147.896.000***		***147.896.000***		***147.896.000***		***147.896.000***		***147.896.000***	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	12	26.400.000	12	26.400.000	12	26.400.000	12	26.400.000	12	26.400.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang urusan / program / outcome/ kegiatan / sub kegiatan output	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	Base Line Tahun 2024										Keterangan
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	8	116.496.000	8	116.496.000	8	116.496.000	8	116.496.000	8	116.496.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**				***151.976.000***		***151.976.000***		***151.976.000***		***151.976.000***		***151.976.000***	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	16	82.115.000	16	82.115.000	16	82.115.000	16	82.115.000	16	82.115.000	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	10	14.320.000	10	14.320.000	10	14.320.000	10	14.320.000	10	14.320.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-		53.541.000		53.541.000		53.541.000		53.541.000		53.541.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang urusan / program / outcome/ kegiatan / sub kegiatan output	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	Base Line Tahun 2024										Keterangan
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-		-		-		-		-		-	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sub Kegiatan prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama, RPJMD, dan Pendanaan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel
dibawah ini :

Tabel 4.3.
Sub Kegiatan prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN EMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pulosari adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pulosari

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN KE						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Jumlah Desa / kelurahan mandiri di Kecamatan	Desa / Kelurahan	2	2	3	4	5	6	7	
2	Nilai SKM	Nilai	83,47	87,00	87,2	87,50	87,75	88,00	88,25	
3	Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri	%	16,67	16,67	25,00	33,33	41,67	50,00	58,33	

Indikator kinerja kunci (IKK) adalah urusan keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Pulosari dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Pemalang

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2929	2030	
NIHIL										

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan periode Tahun 2025-2029 dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pemalang yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029. Sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian dan Renstra PD Kabupaten Pemalang yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan di Kabupaten Pemalang.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Kecamatan Pulosari ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Pulosari. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman bersama dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Pulosari serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Pemalang. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Pulosari merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan dan/atau target kinerja sasaran Kecamatan Pulosari. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Kecamatan Pulosari yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Pulosari harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Kecamatan Pulosari. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Kecamatan Pemalang di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Pulosari ini.

Pulosari, 2025

CAMAT PULOSARI

AGUS MULYADI., S.IP., M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19790817 199803 1 004

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

Kecamatan Belik sebagai salah satu Perangkat Daerah harus menyusun Renstra Tahun 2025-2029 dikarenakan adanya pemilihan Bupati dan Wakil yang baru. Penyusunan Renstra Kecamatan Belik sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kecamatan Belik berpedoman pada Inmendagri No, 2 Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Belik untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Belik serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Renstra menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Belik selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dan merupakan tolak ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan pelayanan publik yang baik dan mewujudkan masyarakat desa/kelurahan yang berdaya.

Dokumen Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut :

Gambar 1.2
Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

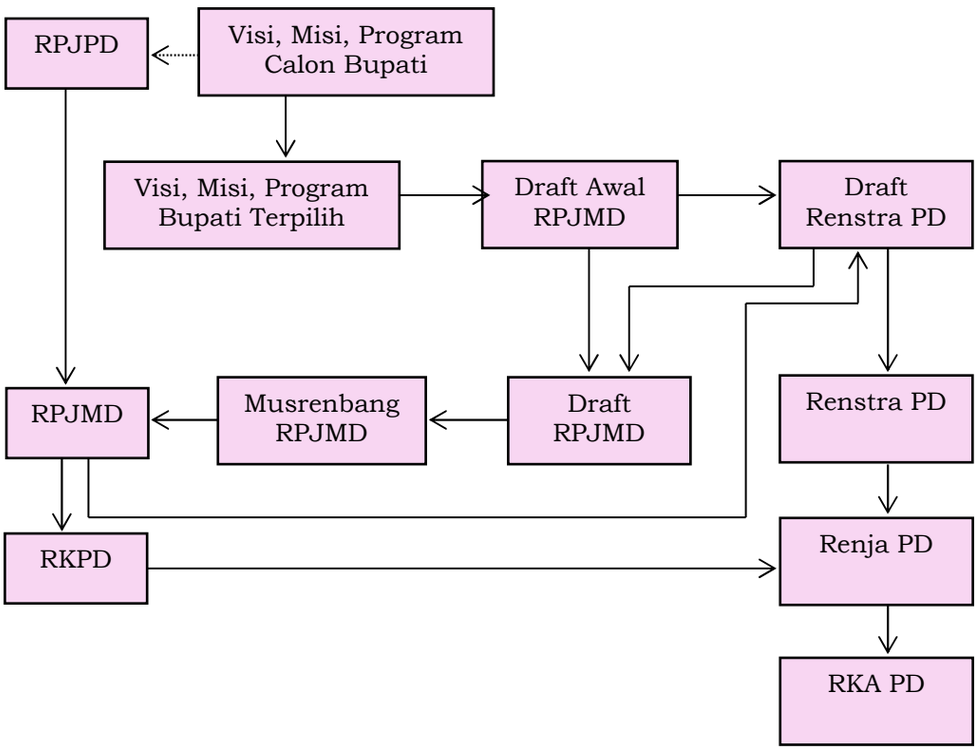

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun

https://jdih.pemalangkab.go.id

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 adalah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah melalui peningkatan pelayanan kecamatan yang prima.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Belik untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah di Unsur Kewilayahan;
2. Menjadi ajuan kerja resmi bagi Kecamatan Belik serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Unsur Kewilayahan;
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Kecamatan Belik.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Belik, berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Belik, sumber daya Kecamatan Belik, kinerja penyelenggaraan pelayanan pada Kecamatan Belik, permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Belik, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra PD provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan penentuan isu-isu strategis.
3. Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Belik.
4. Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
5. Bab V Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Belik.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BELIK

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Belik

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Belik

Kecamatan Belik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Belik mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Belik

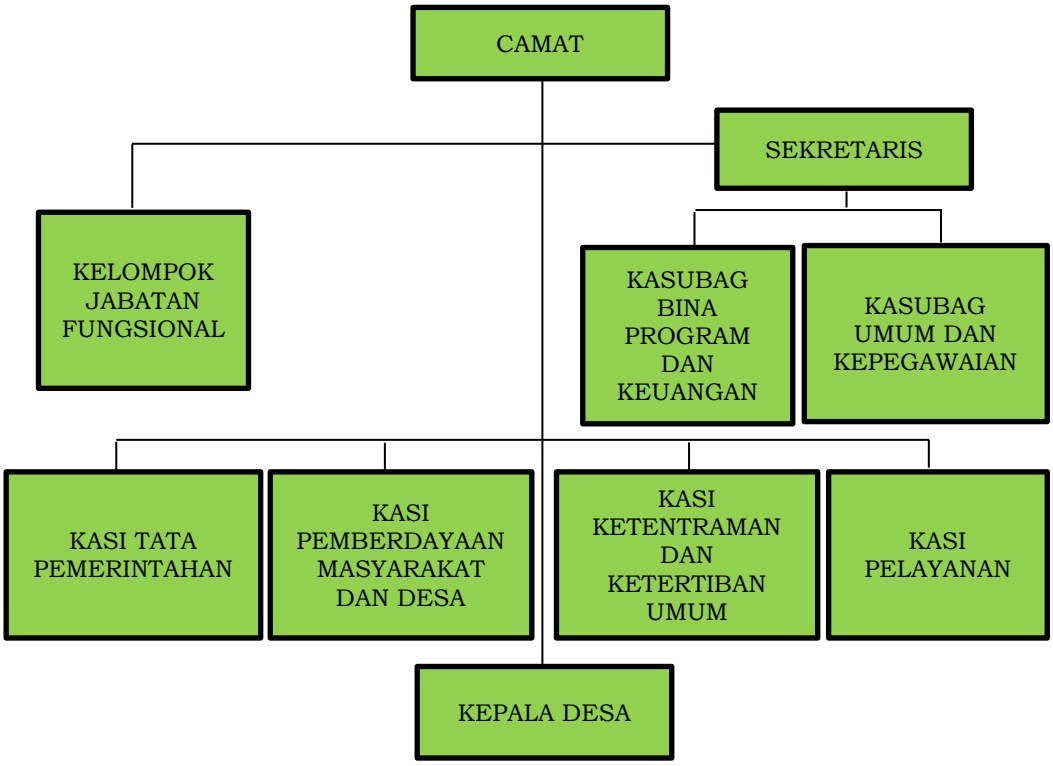

Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

A. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Camat mempunyai uraian tugas :

1. Mengarahkan penyusunan dokumen perencanaan kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan organisasi, perencanaan partisipatif dan perencanaan yang lebih tinggi dan ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Merumuskan kebijakan kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Merumuskan inovasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
4. Mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan kecamatan, meliputi kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan umum dan kesekretariatan sesuai dengan tugas fungsi dan pedoman pelaksanaan agar tepat sasaran dan tujuan;
5. Mengarahkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan dengan melalui bimbingan, supervisi, fasilitasi

https://jdih.pemalangkab.go.id

dan evaluasi guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan;
6. Mengarahkan penyediaan dan pelayaan informasi publik serta penyusunan data dan informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
7. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsinya guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh PD kabupaten yang ada di kecamatan sesuai dengan petunjuk pimpinan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
9. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan Peraturan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
10. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Merumuskan laporan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kerja organisasi.

B. Sekretaris Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan kesekretariatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

https://jdih.pemalangkab.go.id

4. Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian sesuai dengan kebituhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
5. Mengoordinasikan penyusunan kondep inovasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
9. Melaksanakan tugas dan kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

a. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Menyusun konsep dokumen perencanaan Kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan oprganisasi, perencanaan partisipatif, dan perencanaanyang lebih tinggi guna dirumuskan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep laporan capaian kinerja Kecamatan yang meliputi LkjIP, laporan pelaksanaan APBD dan laporan kinerja lain berdasarkan Renja dan realisasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban;

https://jdih.pemalangkab.go.id

5. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib adminstrasi;
6. Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan keuangan;
7. Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi LRA, LO, LPE, neraca dan CaLK serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;
8. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
10. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kecamata sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepasa pimpinan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai sengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

https://jdih.pemalangkab.go.id

3. Mengelola kegiatan administrasi surat menyurat, kepegawaian, penataan arsip, dokumentas, dan kearsipan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
4. Mengelola kegiatan kerumahtanggaan meliputi penyediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, pelayanan tamu dinas dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Mengelola administrasi barang milik daerah yang meliputi penyusunan analisa kebutuhan dan pemeliharaan barang, penatausahaan barang, dan penyusunan administrasi barang lainnya sesuai dengan peraturan pengelolaan barang milik daerah guna tertib administrasi;
6. Mengelola kegiatan ketatalaksanaan meliputi penyusunan standart dan prosedur kerja sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Mengelola kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi penyediaan dan pelayanan informasi publik, penyusunan data informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian, pengaturan tata tempat dan tata acara serta kegiatan kehumasan dan keprotokolan lain sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta, dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan memeriksa berkas yang diajukan kepala desa sebagai bahan konsultasi kepada pimpinan guna disahkan oleh pimpinan;
5. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan melalui fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, fasilitasi pemberian tunjangan perangkat desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;
6. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;

https://jdih.pemalangkab.go.id

7. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Seksi Tata Pemerintahan meliputi data monografi desa, data perangkat desa dan data terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
8. Menyusun konsep motivasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, keagamaan, pembinaan kesehatan, keluarga berencana, organisasi perempuan, pendidikan, pemuda dan olahraga dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan sosial desa melalui fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pembangunan desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, fasilitasi

https://jdih.pemalangkab.go.id

penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjaama desa dengan pihak ketiga, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, koordinasi pendampingan desa, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial guna tertib administrasi dan kelancaran dan penyelenggaraan pemerintahan desa;

5. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dengan melibatkan stakeholder terkait demi tercapainya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran;
6. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan dan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawabkan kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;

https://jdih.pemalangkab.go.id

2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan meliputi fasilitasi pengaduan masyarakat, kejadian musibag, bencana umum atau kejadian luar biasa lainnya serta upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lainnya dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan pemuka agama/tokoh masyarakat serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau desa/kelurahan serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna tegaknya peraturan;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah yang ada di wilayah kecamatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dan/atau swasta dan/atau pihak terkait lainnya sesuai dengan prosesur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keamanan dan terpeliharanya prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah;
6. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan yang bergerak di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
7. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kebutuhan informasi publik;

https://jdih.pemalangkab.go.id

9. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

f. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan kegiatan koordinasi terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan dan kabupaten, pemerintah desa/kelurahan, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep rencana operasional dan standar pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
5. Melaksanakan kegiatan fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan di bidang perizinan, non perizinan, administrasi pertanahan dan pelayanan administrasi lainnya sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dan pemeriksaan dokumen/berkas permohonan, cek lokasi apabila disyaratkan, pengesahan hingga penyampaian kembali dokumen/berkas kepada pemohon guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
6. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai

https://jdih.pemalangkab.go.id

dengan prosedur dan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;

7. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tercapainya kepuasan masyarakat;
8. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
9. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
10. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Belik

Sumber daya Kecamatan Belik sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

a. Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Jumlah pegawai di Kecamatan Belik dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyakatan sosial tersaji dalam tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.1.
Pegawai ASN Kecamatan Belik

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Golongan				Jumlah
				I	II	III	IV	
1	Camat	1	-	-	-		1	1
2	Sekcam	1	-	-	-	-	1	1
3	Kasubag	2	-	-	-	2	-	2
4	Kasi Kecamatan	3	-	-	-	3	-	3
5	JFU Kecamatan	7	2	1	2	6		9
6	JFT Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		14	2	1	2	11	2	16

Sumber : Sekretariat Kecamatan Belik, 2025

Tabel 2.2.
Pegawai Non ASN Kecamatan Belik

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tenaga Administrasi	5	4	9
2	Tenaga Keamanan	-	-	-
3	Pengemudi	-	-	-
4	Tenaga Kebersihan	-	-	-
Jumlah		5	4	9

Sumber : Sekretariat Kecamatan Belik, 2025

Pegawai Kecamatan Belik seluruhnya berjumlah 25 orang, meliputi 19 orang laki-laki dan 6 orang perempuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Belik dominan laki-laki yaitu sebanyak 76%. Agar Kecamatan Belik menerapkan responsif gender, untuk perekrutan Pegawai ASN selanjutnya disarankan berjenis kelamin perempuan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Selanjutnya jumlah Pegawai PNS berdasar golongan, meliputi golongan I sebanyak 1 orang, golongan II sebanyak 2 orang golongan III sebanyak 11 orang dan golongan IV sebanyak 2 orang sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Belik dominan bergolongan III yaitu sebanyak 44%.

Tabel 2.3.
Data Struktural Berdasar Diklat Kepemimpinan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Diklatpim III	1	1	-
2	Diklatpim IV	1	1	-
3	ADUM	-	-	-
4	SEPADA	-	-	-
5	Struktural yang belum diklat	5	5	-
Jumlah		7	7	-

Sumber : Sekretariat Kecamatan Belik 2025

Berdasarkan tabel 2.3. dapat dijelaskan bahwa jumlah Pejabat Struktural di Kecamatan Belik yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sejumlah 2 orang dengan rincian Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III sebanyak I orang dengan jenis kelamin laki-laki, Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan tingkat IV sebanyak I orang dengan jenis kelamin laki-laki 2 orang. Sedangkan Pejabat Struktural yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan sejumlah 5 orang dengan jenis kelamin laki-lak, hal ini disebabkan karena masih menunggu penyelenggaraan diklat dari instansi yang berwenang.

Tabel 2.4.
Data Pegawai ASN dan Non ASN
Berdasar Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pasca Sarjana (S2)	1	1	-
2	Sarjana (S1)	15	11	4
3	Diploma	1	1	-
4	SLTA	6	4	2
5	SLTP	1	1	-
6	SD	1	1	-
Jumlah		25	17	6

Sumber : Sekretariat Kecamatan Belik 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

Berdasarkan tabel 2.3. dapat dijelaskan bahwa jumlah Jumlah pegawai Kecamatan Belik berdasar tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S2) sebanyak 1 orang, Sarjana (S1) sebanyak 15 orang, Diploma sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 6 orang dan SD sebanyak 1 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara kualitas SDM di Kecamatan Belik sudah tercukupi, yaitu dengan prosentase berpendidikan S1 sebanyak 60% dan SMA sebanyak 24%.

Tabel 2.5.
Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	IIIA	2	2	-
2	IIIB	-	-	-
3	IVA	5	5	-
4	IVB	-	-	-
Jumlah		7	7	-

Sumber : Sekretariat Kecamatan Belik2025

Jumlah pegawai Kecamatan Belik berdasarkan eselon hanya terdapat 2 (du) yaitu Eselon IIIA sebanyak 2 orang dan eselon IVA sebanyak 5 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Kecamatan Belik berdasarkan tingkat eselon dominan adalah eselon IVA yaitu sebanyak 71,43%.

b. Sarana dan Prasarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Kecamatan Belik dapat dilihat pada tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.6.
Inventaris Aset Kecamatan Belik

No	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Jumlah Harga (Rp)
					Baik	Sedang	Rusak	
1	01		Tanah					
		01	Tanah	1				673.750.000,00
			Jumlah KIB A	**1**	-	-	-	**673.750.000,00**
2	01		Peralatan dan Mesin					
		02	Alat-alat Besar	2				15.900.000,00
		03	Alat-alat Angkutan/Kendaraan	12				532.128.428,00
		04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	4				11.900.000,00
		05	Alat Pertanian	0				0,00
		06	Alat Kantor & Rumah Tangga	236				462.488.431,00
		07	Alat Studio & Alat Komunikasi	18				99.390.000,00
		08	Alat-alat Kedokteran	0				0,00
		09	Alat Laboratorium	2				3.000.000,00
		10	Alat-alat persenjataan/keamanan	0				0,00
			Jumlah KIB B	**274**				**1.124.806.859,00**
3	03		Gedung dan Bangunan					
		11	Bangunan Gedung	8				1.537.790.476,00
		12	Monumen	0				0,00
			Jumlah KIB C	**8**				**1.537.790.476,00**
4	04		Jalan, Irigasi dan Jaringan					
		13	Jalan & Jembatan	0				0,00
		14	Bangunan Air/Irigasi	0				0,00
		15	Instalasi	1				1.500.000,00
		16	Jaringan	1				500.000,00
			Jumlah KIB D	**2**				**2.000.000,00**
5	05		Aset Tetap Lainnya					
		17	Buku dan Perpustakaan	0				0,00
		18	Barang Bercorak Kebudayaan	1				10.000,00
		19	Hewan, Ternak dan Tanaman	0				0,00
			Jumlah KIB E	**1**				**10.000,00**
6	06		Konstruksi dalam Pengerjaan	0				0,00
			Jumlah KIB F	**0**				**0,00**
			Jumlah Total	**286**				**3.386.684.997,00**

Sumber : Sekretariat Kecamatan Belik, 2025

c. Administrasi Kewilayahan

Terdapat 13 desa di Kecamatan Belik dengan perincian sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.7.
Administrasi Kewilayahan Kecamatan Belik

No	Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT	Jumlah Perangkat Desa & Kades	Jumlah Linmas	Ket
1	Gombong	5	46	5	13	10	
2	Belik	7	39	7	14	10	
3	Gunungtiga	2	12	4	10	11	
4	Kuta	4	44	9	11	28	
5	Badak	4	40	9	12	10	
6	Gunungjaya	5	25	10	12	16	
7	Simpur	3	34	3	10	10	
8	Mendelem	5	42	13	13	10	
9	Beluk	4	37	8	12	11	
10	Bulakan	5	35	9	11	20	
11	Sikasur	2	21	4	11	10	
12	Kalisaleh	1	8	1	9	10	
13	Sodong Basari	2	17	4	5	10	
Jumlah		**49**	**400**	**86**	**138**	**166**	

Sumber : Sekretariat Kecamatan Belik, 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Belik

Gambaran kinerja pelayanan Kecamatan Belik Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan Tabel 2.9 berikut :

Tabel 2.8.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Cakupan layanan masyarakat	%	98,27	91,82	91,82	93,78	94,07	96,02	0	0	84,31	85,31	86,03					
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kecamatan	indeks	88,31	78,00	83,31	84,31	85,31	86,31	0	0	84,31	85,31	86,03					
3	SAKIP	nilai	-	38,01	38,01	40,01	45,01	50,01	42,89	47,00	52,45	54,35	60,40					
4	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	indeks	-	36,01	36,01	39,01	42,01	45,01	0	9,72	11,72	0	0					
5	Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan publik	%	-	84,11	84,11	85,56	87,00	88,44	0	0	100	97,24	99,62					
6	Persentase Masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%	-	100	100	100	100	100	100	100	85,21	106,07	99,98					
7	Persentase gangguan trantibum Tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
8	Persentase potensi konflik Tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
9	Persentase desa bertata Kelola pemerintahan baik	%	-	75,00	75,00	83,33	83,33	91,67	1001	00	100	171,33	99,96					

Sumber : Kecamatan Belik, 2025

Semua pelayanan kinerja yang dilakukan oleh Kecamatan Belik hampir dapat mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini didukung adanya komitmen oleh semua pihak dan ketersediaan sarana dan prasarana yang mencukupi.

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.9.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 Sesuai Bab II Rancangan Awal RPJMD tahun 2025 – 2029

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	%	100	100	100	100	100
2	Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	%	80	80	80	80	80
3	Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan	%	100	100	100	100	100
4	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi	%	83,33	83,33	83,33	83,33	100
5	Persentase jalan kewenangan kelurahan kondisi baik	%	NA	NA	NA	NA	NA
6	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	%	100	100	100	100	100
7	Jumlah potensi konflik	kasus	6	2	1	0	0
8	Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik	%	75	75	76,92	76,92	83

Sumber : Kecamatan Belik, 2025

Tabel 2.10.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang

No	Indikator Kinerja	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	292.146.500	0	0	0	0	292.146.500		0	0	0	96,90	0	0	0	0	0	0
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	261.000.000	0	0	0	0	261.000.000		0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	9.710.000	0	0	0	0	9.710.000		0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
4	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran	46.120.000	0	0	0	0	46.120.000		0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	342.655.000					342.655.000											
6	Program pengembangan kewilayahan	172.177.500	0	0	0	0	172.177.500		0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
6	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	0	709.056.600	2.877.038.700	2.659.630.800	2.632.576.850	0	762.313.716	2.771.426.407	2.704.656.971	2.461.516.888	0	107,51	96,46	96.18	93,50	-141,81	
7	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	0	74.187.800	39.446.000	20.112.000	22.022.000	0	74.187.600	39.446.000	20.112.000	21.938.000	0	99,99	100	100	99,62	-14,837	
8	Program pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	0	43.435.600	34.663.300	52.130.200	76.106.650	0	43.412.200	34.663.300	52.130.200	76.092.000	0	99,95	100	100	99,98	-8,687	

https://jdih.pemalangkab.go.id

9	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	0	0	10.260.000	4.980.000	12.818.000	0	0	**10.260.000**	4.980.000	12.818.000	0	0	100	100	100	-2,051	
10	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	0	17.683.600	90.675.000	26.300.000	40.625.000	0	17.683.600	**90.675.000**	26.300.000	40.625.000	0	100	100	100	100	-3,536	
11	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	0	225.636.400	77.103.000	49.034.000	110.399.500	0	224.194.500	**77.103.000**	49.034.000	110.356.000	0	99,36	100	100	99,96	-45,13	

Sumber : Kecamatan Belik, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Belik

Kecamatan Belik dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Belik tahun 2025-2029, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Belik adalah sebagai berikut:

1. Kemajuan teknologi menuntut Kecamatan Belik untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan transparan kepada masyarakat;
2. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang menuntut Kecamatan Belik untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien;
3. Kebutuhan masyarakat desa/kelurahan yang semakin beragam menuntut Kecamatan Belik agar lebih inovatif dalam fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
4. Masih adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan, menuntut Kecamatan Belik agar lebih meningkatkan patroli dan koordinasi dengan instansi terkait;
5. Masih adanya konflik sosial di tingkat kecamatan, menuntut Kecamatan Belik agar lebih meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat dan koordinasi dengan instansi terkait.
6. Masih rendahnya desa yang beradministrasi pemerintahan baik menuntut Kecamatan agar meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintahan desa.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Belik adalah sebagai berikut:

1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya Perangkat Daerah dan Pendamping Desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa;

https://jdih.pemalangkab.go.id

3. Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan;
4. Adanya Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa dan kecamatan;
5. Adanya Perangkat Daerah dan Pendamping Desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa.

2.3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Belik

3.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan,Kecamatan Belik sebagai PD mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Belik dapat dilihat dalam tabel 2.11 berikut :

Tabel 2.11.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Belik

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia	Masih terbatasnya jenis data pemerintahan yang dipublikasi	Masih terbatasnya data pemerintahan yang tersedia
		Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat	Belum tersedianya SOP pelayanan yang sesuai kebutuhan
			Masih kurangnya peran Kecamatan dalam pencapaian SPM
		Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat	Masih terdapat ketidaksesuaian data masyarakat miskin

https://jdih.pemalangkab.go.id

2	Masih rendahnya peran serta masyarakat desa		Masih rendahnya tingkat partisipasi musrenbang desa
		Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Masih rendahnya tingkat partisipasi Musrenbang Kecamatan
			Belum optimalnya pendampingan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten
		Belum optimalnya peran serta lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Masih rendahnya sarana prasarana yang dimiliki lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan
			Masih rendahnya kapasitas pengelola lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan
3	Belum optimalnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Masih rendahnya linmas yang mempunyai kompetensi	Belum optimalnya koordinasi dengan Polsek dan Koramil
			Masih terbatasnya Linmas yang mengikuti pelatihan
		Belum optimalnya koordinasi penegakkan Perda/Perbup	Belum optimalnya koordinasi monitoring penegakkan Perda/Perbup
4	Masih terjadi potensi konflik di tingkat desa dan kecamatan	Masih banyak masyarakat yang belum paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Belum optimalnya peringatan hari besar nasional dan hari besar agama sebagai upaya menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
			Masih minimnya pembinaan

https://jdih.pemalangkab.go.id

			wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di tingkat desa dan kecamatan
			Belum optimalnya penanganan potensi konflik sosial
			Perlu ditingkatkannya koordinasi antar pimpinan di Kecamatan
5	Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait tata kelola pemerintahan desa	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Masih banyak desa yang belum mampu menyusun Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
			Masih banyak desa yang belum mampu melaksanakan administrasi tata pemerintahan desa dengan tertib
			Masih banyak desa yang belum mampu mengelola keuangan desa dan mendayagunakan aset desa
			Belum optimalnya pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa
			Ada desa yang mengadakan pemilihan kepala desa
			Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
			Ada desa yang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa

https://jdih.pemalangkab.go.id

			Belum optimalnya fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
			Belum optimalnya fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
			Belum optimalnya fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa

Pengarusutamaan gender diterapkan oleh Kecamatan Belik pada kegiatan Musrenbang Kecamatan, dimana perwakilan kelompok perempuan menjadi salah satu komponen peserta. Pengarusutamaan gender diterapkan juga dalam fasilitasi lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yaitu fasilitasi kepada PKK dan Posyandu.

2.4 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Penelaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Belik yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah :

https://jdih.pemalangkab.go.id

"PEMALANG BERCAHAYA - BERSIH CAKAP HANDAL, MULYA"

Visi ini memiliki pembentuk kata :

1. **Bersih :** Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan
2. **Cakap :** dimaknai memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
3. **Handal :** dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang Tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.
4. **MULYA** : Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan local sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi Masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius.

Dalam rangka mencapai visi diatas berikut ini Misi RPJMD 2025-2029 berdasarkan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yaitu:

1. **Misi 1 Resik** : menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih. Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik
2. **Misi 2 Hijau** : meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sektor unggulan, Pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau, yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan) yang

https://jdih.pemalangkab.go.id

ramah lingkungan, industri hijau Dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM dimasyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.

3. **Misi 3 Apik** : meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penaatan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dari Desa
4. **Misi 4 Peduli** : meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan Masyarakat. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi
5. **Misi 5 Silaturahmi** : meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan Sejahtera. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, dan saling menghormati dan teposliro
6. **Misi 6 Organisatoris** : meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan *Good Governance, Clean Governance* dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.
7. **Misi 7 Digitalisasi** : memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas Masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi
8. **Misi 8 Ikhlas** : menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkan kearifan dan budaya lokal.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sesuai dengan Misi Bupati Pemalang di atas, maka Kecamatan Belik mendukung misi Bupati tersebut yaitu **Misi Ke 6 (Organisatoris : meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi.** Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan *Good Governance, Clean Governance* dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik).

Tujuan untuk mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih sehat dan nyaman.
2. Meningkatkan daya saing pembangunan daerah
3. Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
4. Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, yang menciptakan keamanan dengan nilai-nilai budaya dan kegotong-royongan
5. Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel.

Dimana tujuan dari Kecamatan Belik adalah **Meningkatnya pelayanan publik yang prima**, sesuai dengan tujuan Bupati yang ke 5 (lima) yaitu meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel.

Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Sasaran pembangunan jangka menengah adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1 Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih sehat dan nyaman dengan sasarannya : Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan serta pengelolaan sampah
2. Tujuan 2 Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel dengan sasaran sebagai berikut : Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik
3. Tujuan 3 Meningkatkan daya saing pembangunan daerah dengan sasaran sebagai berikut :
   a. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi lokal
   b. Meningkatnya kualitas SDM daerah
   c. Meningkatnya kemandirian pangan
   d. Meningkatnya pengendalian harga bahan pokok dan penting

https://jdih.pemalangkab.go.id

e. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata
f. Meningkatnya kualitas pembangunan desa dan Kawasan perdesaan
g. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender
h. Meningkatnya kualitas riset dan inovasi

4. Tujuan 4 Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dengan sasaran sebagai berikut :
   a. Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat
   b. Meningkatnya penanganan pengangguran
5. Tujuan 5 Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, yang menciptakan keamanan dengan nilai nilai budaya dan kegotong-royongan dengan sasaran sebagai berikut :
   a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hidup berdampingan secara harmonis dan kondusif
   b. Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana
   c. Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal

Berdasarkan sasaran RPJMD 2025-2029 diatas maka Kecamatan Belik mempunyai 2 (dua) sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan
2. Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan

Uraian mengenai telaah visi, misi dan program prioritas Bupati dapat dilihat pada tabel 2.12. berikut :

Tabel 2.12.
Telaah Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati

Misi/Program Prioritas	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
Visi : "PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA"				
Misi 6 : Meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi	1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1. Masih terbatasnya pelayanan kepada masyarkat	1. Ruang pelayanan belum memadai 2. Belum memiliki petugas pelayanan yang berstatus PNS 3. Petugas pelayanan belum memiliki sertifikat	1. Perlu adanya peran pimpinan agar ruang pelayanan lebih memadai dengan memasukkan pada rencana anggaran kecamatan 2. Membuat usulan permintaan Tenaga PNS kepada BKD Kab.Pemalang 3. Memberi kesempatan kepada petugas pelayanan yang ada untuk

https://jdih.pemalangkab.go.id

Misi/Program Prioritas	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
			yang berkaitan dengan pelayanan	mengikuti bimbingan teknis maupun studi banding ke kecamatan lain mapun OPD di sekitar Kab.Pemalang terkait pelayanan publik
	2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan	Perlu adanya dukungan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang lebih optimal dari Kecamatan dan Pendamping Desa
	3. Penyelenggaraan koordinasi ketentraman	Belum optimalnya penanganan gangguan	Masih kurangnya kesadaran	Peran Linmas yang ada di

https://jdih.pemalangkab.go.id

Misi/Program Prioritas	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
	dan ketertiban umum	ketentraman dan ketertiban umum	masyarakat untuk patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	desa/kelurahan lebih dimaksimalkan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan desa/kelurahan
	4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Masih terjadi potensi konflik ditingkat desa dan kecamatan	Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap kondisi di lingkungan sekitar desa/kelurahan dan kecamatan	Adanya FKDM dan Forkompimcam yang siap menangani potensi konfilik ditingkat desa/kelurahan dan kecamatan
	5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan	Masih rendahnya desa terkait tata kelola pemerintahan desa	Masih rendahnya kemampuan/kapasitas dari aparatur	Adanya pendamping desa yang mendukung pembinaan dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Misi/Program Prioritas	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
	pemerintahan desa 6. Penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Masih rendahnya nilai SAKIP yang diperoleh	desa/kelurahan dalam tata keloloa pemerintahan Masih perlu adanya perbaikan serta komitmen dalam manajemen kinerja pada kecamatan	pengawasan pemerintah desa Perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan implementasi SAKIP

2.5 Perumusan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan, pada tabel berikut dirumuskan sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.13.
Isu Strategsi Kecamatan Belik

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	1. Menurunnya IRB 2. Masih rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan 3. Belum optimalnya penataan desa 4. Belum optimalnya data statistik yang dimiliki 5. Masih kurangnya Tingkat keamanan informasi pemerintahan 6. Kurangnya pelestarian warisan budaya 7. Belum optimalnya sarana dan prasarana perpustakaan 8. Belum optimalnya koordinasi antar bidang 9. Belum optimalnya dukungan untuk	Belum optimalnya budaya e-government	1. Krisis utang 2. Cyber Security	1. Tata kelola pemerintahan belum optimal 2. Kepastian dan Penegakan hukum masih lemah 3. Demokratisasi belum optimal	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Reformasi tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi

https://jdih.pemalangkab.go.id

	pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan kurangnya kualitas SDM yang sesuai kompetensinya 10. Belum optimalnya kualitas SDM dan perencanaannya 11. Masih rendahnya PAD pajak daerah yang diterima namun angka belanja daerah tinggi 12. Belum maksimalnya administrasi kepegawaian 13. Masih kurangnya pemandaatan hasil penelitian dan pengembangan 14. Belum optimalnya Penyelenggaraan pengawasan 15. Belum optimalnya pelayaan publik dan masih kurangnya SDM yang kompeten 16. Rasio belanja pegawai					

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB III
TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Belik

Kecamatan Belik dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing dibidang pelayanan publik, maka Kecamatan Belik harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas dibidang pelayanan publik, Kecamatan Belik secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat secara umum.

3.1.1 Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Belik selama tahun 2025–2029 adalah "**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah kecamatan**". Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Belik sebagai perangkat daerah yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, bertujuan untuk meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah kecamatan. Tujuan tersebut diukur dengan indikator jumlah desa/kelurahan mandiri di kecamatan.

3.1.2 Sasaran

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Belik dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Belik selama tahun 2025-2029, adalah "**Meningkatnya kualitas pelayanan**

https://jdih.pemalangkab.go.id

dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat". Sasaran tersebut diukur dengan indikator nilai SKM dan Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri yang diperoleh dari jumlah desa mandiri dibagi jumlah seluruh desa di kecamatan dikali 100%.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Belik dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Belik

uan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Capaian					Kete
				2025	2026	2027	2028	2029	
nya ta kelola an, aan an an n n t di camatan		Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan	angka	1	2	3	4	5	
	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Nilai SKM	nilai	86,60	86,65	86,70	86,75	86,80	
		Prosentase meningkatnya jumlah Desa Mandiri	%	7,70	15,39	23,07	30,77	38,46	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Arah Kebijakan

gi dan arah kebijakan merupakan cara yang diambil oleh Kecamatan Belik guna mencapai tujuan dan s
Strategi dan arah kebijakan dapat dirangkum pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.
Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Belik

an	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	K
tatnya tata tahan s ayaa mi, ngan gan tan kat di tan					
	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	1. Meningkatkan pelayanan publik sesuai SOP	1.1. Mengimplementasikan SOP 1.2. Mewujudkan pelayanan berbasis digital, mudah dan murah	1.1. Penyediaan informasi pemerintahan yang mutakhir 1.2. Pelayanan pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, ramah dan nyaman	

https://jdih.pemalangkab.go.id

				1.3. Mendekatkan pelayanan ke masyarakat	
		2. Menyediakan sarana dan prasarana untuk menampung usulan/aspirasi masyarakat demi peningkatan kinerja	1.1. Mewujudkan pembangunan desa mandiri dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pengembangan Kawasan perdesaan penguatan kelembagaan desa dan mendorong berkembangnya BUMDes dalam rangka meningkatkan perekonomian desa	2.1. Peningkatan peran serta masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan	
		3. Meningkatkan kondisi yang ketentraman dan ketertiban wilayah	3.1. Mewujudkan peningkatan harmonisasi kehidupan, menguarang potensi konflik, mendorong demokratisasi dan peningkatan kondusivitas wilayah 3.2. Peningkatkan mitigasi bencana, kesiap siagaan bencana 4.1. Peningkatan harmonisasi kehidupan, penguarang potensi konflik, mendorong demokratisasi dan peningkatan kondusivitas wilayah	3.1. Penambahan jumlah linmas yang berkompeten 3.2. Peningkatan kegiatan pelatihan Linmas 3.3. Peningkatan kegiatan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

				patroli/monitoring	
		4. Meningkatkan penanganan konflik	5.1. Peningkatan pembangunan desa mandiri dan Mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pengembangan Kawasan perdesaan penguatan kelembagaan desa dan mendorong berkembangnya BUMDes dalam rangka meningkatkan perekonomian desa.	4.1. Penyelenggaraan hari-hari besar dan hari jadi kabupaten untuk menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa	
		5. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		4.2. Meningkatkan peran Forkompimcam	
				5.1. Pemberian fasilitasi penyusunan peraturan, perencanaan, pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan dan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

				pendayagunaan aset 5.2. Pembekalan tugas kepala desa, perangkat desa dan BPD	
	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan	1. Meningkatkan nilai SAKIP dan IRB	1.1. Peningkatan akuntabilitas pembangunan melalui peningkatan kualitas perencanaan, kinerja dan pelaporan. 1.2. Peningkatan maturitas system pengendalian intern melalui peningkatan komitmen pemerintah dalam menjalankan pembangunan, penguatan kebijakan dan regulasi, peningkatan kapabilitas APIP, peningkatan kualitas dan profesionalisme pegawai, penguatan manajemen resiko, digitalisasi, serta evaluasi berkelanjutan	1.1. Penyediaan perencanaan yang berkualitas dan pelaksanaan evaluasi kinerja yang efektif dan obyektif 1.2. Penyediaan sarana prasarana kantor, kebutuhan kepegawaian, keuangan dan administrasi pelayanan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

4.1.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Belik

Dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maka Kecamatan Belik menyusun program, kegiatan, sub kegiatan penyelenggaraan bidang urusan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang yang relevan dengan RPJMD 2025-2029. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dapat tersusun pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Kecamatan Belik

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan						
		Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat			Nilai SKM Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Persesntase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
				Persentase dokumen pemerintahan yang dipublikasi	Jenis data pemerintah yang dipublikasi	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Persentase dokumen pelayanan kepada masyarakat terselesaikan	Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Subkegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Subkegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Persentase dokumen pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada camat yang tersedia	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang tersusun	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
				Persentase kehadiran lembaga peserta musrenbang desa dan musrenbang kecamatan	Jumlah dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	

https://jdih.pemalangkab.go.id

					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Subkegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum		Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				Persentase laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Persentase perda dan perbup yang dikoordinasikan penegakkannya	Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Subkegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

https://jdih.pemalangkab.go.id

			Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama		Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN**	**KET**
				Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Subkegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Subkegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa		Persentase kesesuaian RKPDes dan RPJMDes dengan RPJMD	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan	Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Subkegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Laporan dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan Perundang-undanagan	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Subkegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	

4.2. Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Pendanaan

Dalam mendukung visi dan misi Bupati telah disusun program, kegiatan,subkegiatan dan pendanaan Kecamatan Belik selama tahun 2026 sampai dengan 2030, seperti yang tecantum pada tabel berikut :

Tabel 4.2.
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Kecamatan Belik

No	Tujuan	Sasaran	Outcome/ Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
								2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan				Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan	Angka	1	2		3		4		5		5		
		Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat			Nilai SKM	Nilai	86,03	86,65		86,70		86,75		86,80		86,85		
					Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri	%	7,70	15,39		23,07		30,77		38,46		38,46		

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode Bidang Urusan/Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Outcome/ Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
								2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
									3.054.939.000,00		3.217.494.447,00		3.217.494.447,00		3.217.494.447,00			
7.01.01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	57,13		2.820.111.250,00		3.098.298.047,00		3.098.298.047,00		3.098.298.047,00		3.098.298.047,00	
7.01.01.2.01		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Dok	8		16.741.000,00		24.201.000,00		24.201.000,00		24.201.000,00		24.201.000,00	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokume		1	1		1		1		1		1		

https://jdih.pemalangkab.go.id

					n DPA-SKPD (Dokumen)													
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		2	2		2		2		2		2		
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		1	1		1		1		1		1		
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-		1	1		1		1		1		1		

https://jdih.pemalangkab.go.id

					SKPD (Dokumen)													
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		1	1		1		1		1		1		
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		1	1		1		1		1		1		
7.01.01.2.01.0001		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	2	2	3.361.000,00	2	4.361.000,00	2	4.361.000,00	2	4.361.000,00	2	4.361.000,00	
7.01.01.2.01.0002		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	1	1	2.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode Bidang Urusan/Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Outcome/ Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
								2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.01.2.01.0003		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	1	1	2.250.000,00	1	3.250.000,00	1	3.250.000,00	1	3.250.000,00	1	3.250.000,00	
7.01.01.2.01.0004		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok	1	1	2.590.000,00	1	3.590.000,00	1	3.590.000,00	1	3.590.000,00	1	3.590.000,00	
7.01.01.2.01.0005		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dok	1	1	2.237.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	

		n Dokumen Perubahan DPA-SKPD			Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD												
7.01.01.2.01.0006		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap	1	1	2.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	
7.01.01.2.01.0007		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	1	1	2.303.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode Bidang Urusan/Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Outcome/ Output	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
								2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.01.2.02.		Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Dok	1	1	2.161.144.500,00	1	2.377.394.297,00	1	2.377.394.297,00	1	2.377.394.297,00	1	2.377.394.297,00	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		12	12		12		12		12		12			
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyus		1	1		1		1		1		1			

https://jdih.pemalangkab.go.id

					unan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)												
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		18	16		16		16		16		16		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		18	18		18		18		18		18		

https://jdih.pemalangkab.go.id

					(Orang/ bulan)													
7.01.01.2.02. 0001		Tersediany a Gaji dan Tunjangan ASN		Sub Kegiatan Penyedia an Gaji dan Tunjanga n ASN	Jumlah Orang yang Meneri ma Gaji dan Tunjan gan ASN	Oran g	18	18	2.142.321.00 0,00	18	2.354.570.79 7,00	18	2.354.570.79 7,00	18	2.354.570.79 7,00	18	2.354.570.79 7,00	
7.01.01.2.02. 0003		Terlaksana nya Penatausa haan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD		Pelaksan aan Penata Usahaan dan Pengujia n /verifika si Keuanga n SKPD	Jumlah Dokum en Penata Usahaa n dan Penguji an/Veri fikasi Keuana gn SKPD	Dok	12	12	6.125.500,00	12	7.125.500,00	12	7.125.500,00	12	7.125.500,00	12	7.125.500,00	
7.01.01.2.02. 0005		Tersediany a Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Sub Kegiatan Koordina si dan Penyusu nan Laporan Keuanga n Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lapora n Keuang an Akhir Tahun SKPD dan Lapora n Hasil Koordin asi Penyus unan Lapora n Keuang an Akhir Tahun SKPD	Lap	1	1	3.150.000,00	1	4.150.000,00	1	4.150.000,00	1	4.150.000,00	1	4.150.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

7.01.01.2.02.0007		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Lap	18	16	8.048.000,00	16	9.048.000,00	16	9.048.000,00	16	9.048.000,00	16	9.048.000,00	
7.01.01.2.02.0008		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dok	1	1	1.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode Bidang Urusan/Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Outcome/ Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
								2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.01.2.03		Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Dok	2		6.593.000,00	2	10.050.000,00	2	10.050.000,00	2	10.050.000,00	2	10.050.000,00	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		1	1		1		1		1		1		
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		2	2		2		2		2		2		
7.01.01.2.03.0001		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dok	2	2	1.807.000,00	2	2.800.000,00	2	2.800.000,00	2	2.800.000,00	2	2.800.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

7.01.01.2.03.0005		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lap	2	2	2.286.000,00	2	3.300.000,00	2	3.300.000,00	2	3.300.000,00	2	3.300.000,00	
7.01.01.2.03.0006		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lap	1	1	2.500.000,00	1	3.950.000,00	1	3.950.000,00	1	3.950.000,00	1	3.950.000,00	
7.01.01.2.05		Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Orang	27	27	4.400.000,00	27	5.400.000,00	27	5.400.000,00	27	5.400.000,00	27	5.400.000,00	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		0	0		18		18		18		18		

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode Bidang Urusan/Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Outcome/ Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
								2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.01.2.05.0010		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	27	27	4.400.000,00	27	3.000.000,00	27	3.000.000,00	27	3.000.000,00	27	3.000.000,00	
7.01.01.2.05.0011		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Orang)	Orang	0	0	0	18	2.400.000,00	18	311.953.600,00	18	2.400.000,00	18	2.400.000,00	
7.01.01.2.06		Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Paket	358	200	276.933.600,00	200	311.953.600,00	200	311.953.600,00	200	311.953.600,00	200	311.953.600,00	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		2	2		2		2		2		2		
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1	4		4		4		4		4		

https://jdih.pemalangkab.go.id

					yang Disediakan (Paket)													
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		6	6		6		6		6		6		
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		1	1		1		1		1		1		
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		3	3		3		3		3		3		
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		0	1		1		1		1		1		
7.01.01.2.06.0001		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.998.000,00	1	5.998.000,00	1	5.998.000,00	1	5.998.000,00	1	5.998.000,00		

https://jdih.pemalangkab.go.id

7.01.01.2.06.0002		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4	56.000.000,00	4	66.000.000,00	4	66.000.000,00	4	66.000.000,00	4	66.000.000,00	
7.01.01.2.06.0003		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	6	700.000,00	6	3.700.000,00	6	3.700.000,00	6	3.700.000,00	6	3.700.000,00	
7.01.01.2.06.0004		Tersedianya Bahan Logistik Kantor		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	136.355.600,00	3	146.355.600,00	3	146.355.600,00	3	146.355.600,00	3	146.355.600,00	
7.01.01.2.06.0005		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	6.500.000,00	2	7.500.000,00	2	7.500.000,00	2	7.500.000,00	2	7.500.000,00	
7.01.01.2.06.0006		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanagan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanagan yang disediakan	Dokumen	1	1	1.680.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	
7.01.01.2.06.0009		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	358	200	70.700.000,00	200	80.700.000,00	200	80.700.000,00	200	80.700.000,00	200	80.700.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode Bidang Urusan/ Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Outcome/ Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
								2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.01.2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					36.400.000,00		40.400.000,00		40.400.000,00		40.400.000,00		40.400.000,00	
		Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		55	60		0		0		0		60		
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		0	0		0		2		0		0		
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		0	0		3		0		0		0		
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0	0		0		0		1		0		

https://jdih.pemalangkab.go.id

					yang Disediakan (Unit)													
7.01.01.2.07.0002		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Tersediany a Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	0	0	0	0	0	0	2	40.400.000,00	0	0	0	0	
7.01.01.2.07.0005		Tersedianya Mebel		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		60 Unit	36.400.000,00	0	0	0	0	0	0	60 Unit	40.400.000,00	
7.01.01.2.07.0006		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainya yang disediakan(Unit)	-	-	0	0	3	40.400.000,00	0	0	0	0	0	0	
7.01.01.2.07.0010		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainya	Jumlah Unit saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya yang disediakan(Unit)	-	-	0	0	0	0	0	0	1	40.400.000,00	0	0	
7.01.01.2.08				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Laporan	243		178.018.000,00		182.018.000,00		182.018.000,00		182.018.000,00		182.018.000,00	
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12	12		12		12		12		12		

https://jdih.pemalangkab.go.id

		an daerah yang tersedia			yang Disediakan (Laporan)												
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		228	75		75		75		75		75		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		3	3		3		3		3		3		
7.01.01.2.08.0001		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	228	75	15.400.000,00	75	17.400.000,00	75	17.400.000,00	75	17.400.000,00	75	17.400.000,00	
7.01.01.2.08.0002		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3	20.760.000,00	3	22.760.000,00	3	22.760.000,00	3	22.760.000,00	3	22.760.000,00	
7.01.01.2.08.0004		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	141.858.000,00	12	141.858.000,00	12	141.858.000,00	12	141.858.000,00	12	141.858.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

7.01.01.2.09				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Unit	31	-	139.881.150,00	-	146.881.150,00	-	146.881.150,00	-	146.881.150,00	-	146.881.150,00	
		Jumlah barang milik daerah yang terpelihara			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)			16		16		16		16		16		
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)			3		3		3		3		3		
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)			10		10		10		10		10		
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)			12		12		12		12		12		

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Tujuan	Sasaran	Outcome/ Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
								2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.01.2.09.0002		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	16	28.018.150,00	16	30.018.150,00	16	30.018.150,00	16	30.018.150,00	16	30.018.150,00	
7.01.01.2.09.0005		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	-	10	4.500.000,00	10	6.500.000,00	10	6.500.000,00	10	6.500.000,00	10	6.500.000,00	
7.01.01.2.09.0006		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	12	8.030.000,00	12	10.030.000,00	12	10.030.000,00	12	10.030.000,00	12	10.030.000,00	
7.01.01.2.09.0009		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	3	3	99.333.000,00	3	100.333.000,00	3	100.333.000,00	3	100.333.000,00	3	100.333.000,00	
7.01.02		Meningkatnya Kualitas Penyelengga		PROGRAM PNYELENGGARAAN					21.759.000,00		11.120.000,00		11.120.000,00		11.120.000,00		11.120.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

		raan Pemerintah an dan Pelayanan Publik(Baik)		PEMERINTAHAN DAN PELEYANAN PUBLIK													
7.01.02.2.01		Jenis data pemerintah yang dipublikasi		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	Dok	12	-	10.400.000,00	12	5.800.000,00	12	5.800.000,00	12	5.800.000,00	12	5.800.000,00	12	5.800.000,00	
7.01.02.2.01.0002		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dok	12	12	10.400.000,00	12	5.800.000,00	12	5.800.000,00	12	5.800.000,00	12	5.800.000,00	
7.01.02.2.02				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pengaduan masyarakat yang terselesaikan	Kasus	13	-	6.250.000,00	-	2.822.000,00	-	2.822.000,00	-	2.822.000,00	-	2.822.000,00	
		Jumlah Pengaduan masyarakat yang terselesaikan		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah				4		4		4		4		4		

https://jdih.pemalangkab.go.id

				Kecamatan (Laporan)														
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)				8		8		8		8		8		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)				1		1		1		1		1		
7.01.02.2.02.0001		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dok	1	1	2.150.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	
7.01.02.2.02.0002		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4	1.500.000,00	4	822.000,00	4	822.000,00	4	822.000,00	4	822.000,00	
7.01.02.2.02.0003		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	Laporan	8	8	2.600.000,00	8	1.000.000,00	8	1.000.000,00	8	1.000.000,00	8	1.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

		kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)													

No	Tujuan	Sasaran	Outcome/ Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
								2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.02.2.04				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang tersusun	Laporan	24		5.109.000,00		2.498.000,00		2.498.000,00		2.498.000,00		2.498.000,00	
		Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang tersusun			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)			12		12		12		12		12		
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintah			12		12		12		12		12		

https://jdih.pemalangkab.go.id

					an (Laporan)													
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)			0		4		4		4		4			
7.01.02.2.04.0001		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	Dokumen	12	12	3.898.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	
7.01.02.2.04.0002		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan		Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	12	12	1.211.000,00	12	600.000,00	12	600.000,00	12	600.000,00	12	600.000,00	
7.01.02.2.04.0003		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	0	0	0	0	4	898.000,00	4	898.000,00	4	898.000,00	4	898.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

7.01.03		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Belik)		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	%	-		72.965.000,00		42.663.000,00		42.663.000,00		42.663.000,00		42.663.000,00	
7.01.03.2.01				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Dok	8	-	42.495.000,00	-	25.193.000,00	-	25.193.000,00	-	25.193.000,00	-	25.193.000,00	
		Jumlah dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)			6		6		6		6		6		
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)			1		1		1		1		1		

https://jdih.pemalangkab.go.id

					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)			1		1		1		1		1		
7.01.03.2.01.0001		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	6	6	5.000.000,00	6	3.000.000,00	6	3.000.000,00	6	3.000.000,00	6	3.000.000,00	
7.01.03.2.01.0002		Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dok	1	1	34.895.000,00	1	20.593.000,00	1	20.593.000,00	1	20.593.000,00	1	20.593.000,00	
7.01.03.2.01.0003		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdaya		Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas	Laporan	1	1	2.600.000,00	1	1.600.000,00	1	1.600.000,00	1	1.600.000,00	1	1.600.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

		an Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
7.01.03.2.03				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi	Lembaga	6		30.470.000,00		17.470.000,00		17.470.000,00		17.470.000,00		17.470.000,00	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)			0		10		10		10		10		
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)			6		6		6		6		6		
7.01.03.2.03.0001		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	Lembaga	6	6	30.470.000,00	6	15.000.000,00		15.000.000,00	6	15.000.000,00	6	15.000.000,00	
7.01.03.2.03.0002		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan	0	0	0	0	10	2.470.000,00	10	2.470.000,00	10	2.470.000,00	10	2.470.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

					Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)												
7.01.04		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum (Belik)		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	%	100		12.213.000,00		5.032.000,00		5.032.000,00		5.032.000,00		5.032.000,00	
7.01.04.2.01				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun	Laporan	1		5.990.000,00		2.990.000,00		2.990.000,00		2.990.000,00		2.990.000,00	
		Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)			1		1		1		1		1		
7.01.04.2.01.0001		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara		Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian	Laporan	1	1	5.990.000,00	1	2.990.000,00	1	2.990.000,00	1	2.990.000,00	1	2.990.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

		Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
7.01.04.2.02				Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Laporan	1		6.223.000,00		2.042.000,00		2.042.000,00		2.042.000,00		2.042.000,00	
		Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah			Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)			1		1		1		1		1		
7.01.04.2.02.0001		Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan		Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang	Laporan	1	1	6.223.000,00	1	2.042.000,00	1	2.042.000,00	1	2.042.000,00	1	2.042.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

		Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia												
7.01.05		Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama (Belik)		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	%	304		60.250.000,00		37.660.000,00		37.660.000,00		37.660.000,00		37.660.000,00	
7.01.05.2.01				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Orang	304		60.250.000,00		37.660.000,00		37.660.000,00		37.660.000,00		37.660.000,00	
		Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamala			300		300		300		300		300		

https://jdih.pemalangkab.go.id

					n Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)					26		26		26		26		
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi			4		4		4		4		4		

https://jdih.pemalangkab.go.id

					Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)													
7.01.05.2.01.0001		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	300	300	54.900.000,00	300	30.900.000,00	300	30.900.000,00	300	30.900.000,00	300	30.900.000,00	
7.01.05.2.01.0002		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)		Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialiasi,Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialiasi,Konsultasi) Wawasan	0	0	0	0	26	4.000.000,00	26	4.000.000,00	26	4.000.000,00	26	4.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

		Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		ketahanan nasional	kebangsaan dan ketahanan nasional (Orang)												
7.01.05.2.01.0008		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dok	4	4	5.350.000,00	4	2.760.000,00	4	2.760.000,00	4	2.760.000,00	4	2.760.000,00	
7.01.06		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa (Belik)		Program Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintahan Desa	Persentase kesesuaian RKPDes dengan RPJMDes	%	94,12	-	67.640.750,00	-	22.721.400,00	-	22.721.400,00	-	22.721.400,00	-	22.721.400,00	
7.01.06.2.01				Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun	Dok	84	-	67.640.750,00	-	22.721.400,00	-	22.721.400,00	-	22.721.400,00	-	22.721.400,00	
		Terwujudnya desa beradministrasi pemerintahan baik			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)			0		2		2		2		2		
					Jumlah Dokumen Fasilitasi			10		10		10		10		10		

https://jdih.pemalangkab.go.id

					dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)													
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)			1		1		1		1		1		
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)			2		2		2		2		2		
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)			13		13		13		13		13		
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam			13		13		13		13		13		

https://jdih.pemalangkab.go.id

					rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)													
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)			13		13		13		13		13			
					Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)			3		3		3		3		3			
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)			13		13		13		13		13			
					Jumlah Dokumen			13		13		13		13		13			

https://jdih.pemalangkab.go.id

					yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)													
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)			13		13		13		13		13			
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)			1		1		1		1		1			
7.01.06.2.01.0001		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dok	13	13	4.835.000,00	13	1.835.000,00	13	1.835.000,00	13	1.835.000,00	13	1.835.000,00	
7.01.06.2.01.0002		Terlaksananya Fasilitasi		Sub Kegiatan Fasilitasi	Jumlah Dokumen yang	Dok	13	13	10.532.000,00	13	3.532.000,00	13	3.532.000,00	13	3.532.000,00	13	3.532.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

		Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa												
7.01.06.2.01.0003		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa	13	13	11.428.000,00	13	3.428.000,00	13	3.428.000,00	13	3.428.000,00	13	3.428.000,00	
7.01.06.2.01.0004		Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		Sub Kegitan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Laporan	3	3	3.000.000,00	3	1.971.400,00	3	1.971.400,00	3	1.971.400,00	3	1.971.400,00	
7.01.06.2.01.0005		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dok	2	2	4.522.000,00	2	1.522.000,00	2	1.522.000,00	2	1.522.000,00	2	1.522.000,00	
7.01.06.2.01.0006		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan	Dok		10	10.000.000,00	10	2.000.000,00	10	2.000.000,00	10	2.000.000,00	10	2.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

					Kepala Desa													
7.01.06.2.01.0007		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dok	1	1	4.090.000,00	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	
7.01.06.2.01.0008		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Sub Kegiatan Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah dokumen Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	0	0	0	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	
7.01.06.2.01.0009		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Sub Kegiatan Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0	0	0	0	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	
7.01.06.2.01.0011		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Sub Kegitan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		13	13	8.253.750,00	13	1.253.750,00	13	1.253.750,00	13	1.253.750,00	13	1.253.750,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

7.01.06.2.01.0013		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dok	13	13	4.500.000,00	13	1.500.000,00	13	1.500.000,00	13	1.500.000,00	13	1.500.000,00	
7.01.06.2.01.0016		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dok	13	13	6.480.000,00	13	2.480.000,00	13	2.480.000,00	13	2.480.000,00	13	2.480.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan periode Tahun 2025-2029 dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pemalang yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029. Sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian dan Renstra PD Kabupaten Pemalang yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan di Kabupaten Pemalang.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Kecamatan Belik ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Belik. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman bersama dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Belik serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Pemalang. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Belik merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan dan atau target kinerja sasaran Kecamatan Belik. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Kecamatan Belik yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Belik harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LkjIP) Kecamatan Belik. Laporan Kinerja (LkjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Kecamatan Belik di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Belik ini.

Pemalang,
CAMAT BELIK

MUCHAMMAD MAKSUM, S.IP.
Pembina
NIP. 19750213 200604 1 005

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasar pasal 221 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan terlayaninya berbagai kebutuhan administrasi masyarakat diharapkan dapat memperlancar berbagai urusan masyarakat. Kecamatan juga melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sehingga pemerintahan desa dapat lebih optimal dalam memajukan desanya dan mensejahterakan masyarakatnya. Agar tujuan tersebut dapat tercapai harus didukung oleh perencanaan yang baik sehingga perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

Kecamatan Watukumpul sebagai salah satu PD harus menyusun Renstra. Penyusunan Renstra Kecamatan Watukumpul sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kecamatan Watukumpul disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kementerian dan Renstra PD Kabupaten Pemalang yang terkait.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Watukumpul untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Watukumpul serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Renstra menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Watukumpul selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan pelayanan publik yang baik dan mewujudkan masyarakat desa yang aktif.

Penyusunan Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Kecamatan Watukumpul,

https://jdih.pemalangkab.go.id

dimana kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Watukumpul harus mendukung kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai.

Proses penyusunan Renstra meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1) Persiapan Penyusunan Renstra PD, terdiri dari pembentukan tim penyusun Renstra PD, orientasi mengenai Renstra PD, agenda kerja tim penyusun Renstra PD, penyiapan data dan informasi; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD; (3) Penyusunan Rancangan Renstra PD; (4) Forum Perangkat Daerah; (5) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD; dan (6) Penetapan Renstra PD.

Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 disajikan dalam bagan berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029

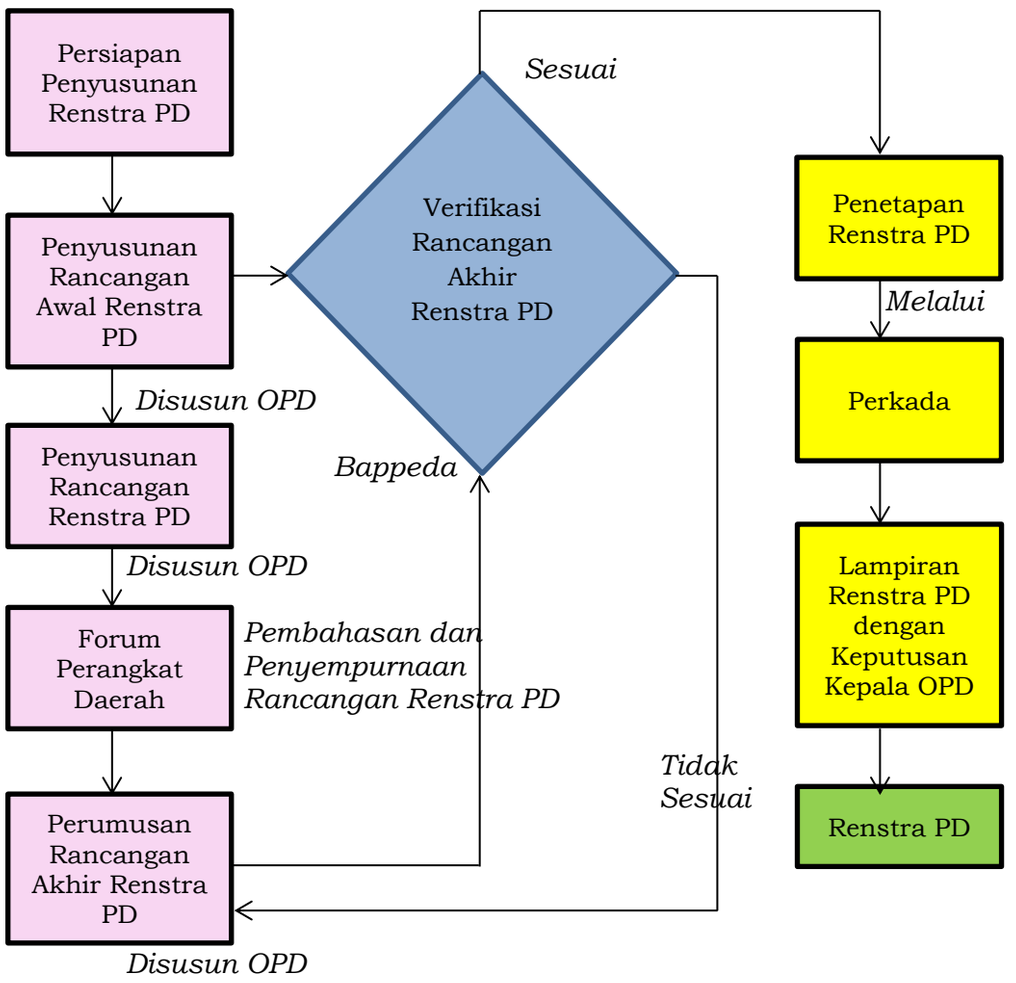

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah)

Dokumen Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang. Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Gambar 1.2
Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

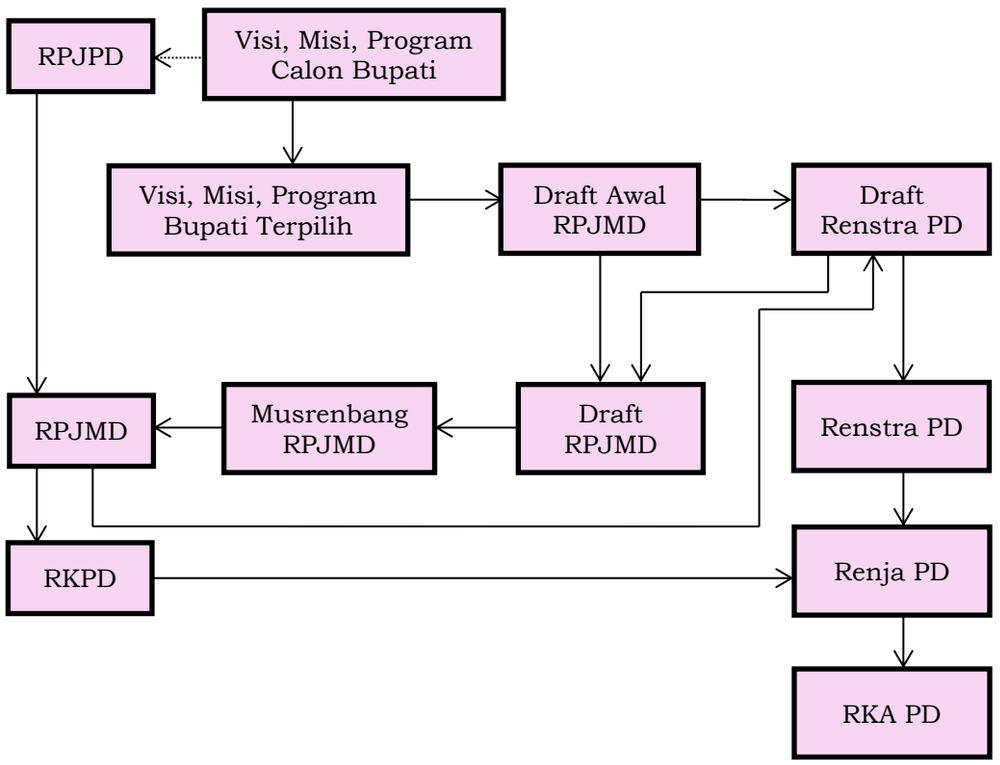

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

https://jdih.pemalangkab.go.id

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor xxx);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);

https://jdih.pemalangkab.go.id

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2);
30. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
31. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
32. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang;
33. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

https://jdih.pemalangkab.go.id

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 adalah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah melalui meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan Masyarakat di wilayah kecamatan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Watukumpul untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah di Unsur Kewilayahan;
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Kecamatan Watukumpul serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Unsur Kewilayahan;
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Kecamatan Watukumpul.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2021-2026 mengacu pada Inmendagri Nomor 02 Tahun 2025, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Watukumpul, berisi gambaran pelayanan perangkat daerah paling sedikit memuat: tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Watukumpul, sumber daya Kecamatan Watukumpul, kinerja pelayanan Kecamatan Watukumpul, permasalahan pelayanan Kecamatan Watukumpul, isu strategis Kecamatan Watukumpul dan telaah visi misi Bupati dan Wakil Bupati.
3. Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, berisi tentang tujuan Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029, sasaran renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029, serta strategi dan arah kebijakan Kecamatan Watukumpul dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029.
4. Bab IV Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, berisi uraian program, uraian kegiatan, uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Watukumpul.
5. Bab V Penutup, berisi Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN WATUKUMPUL

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Watukumpul

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Watukumpul

Kecamatan Watukumpul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Watukumpul mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Watukumpul

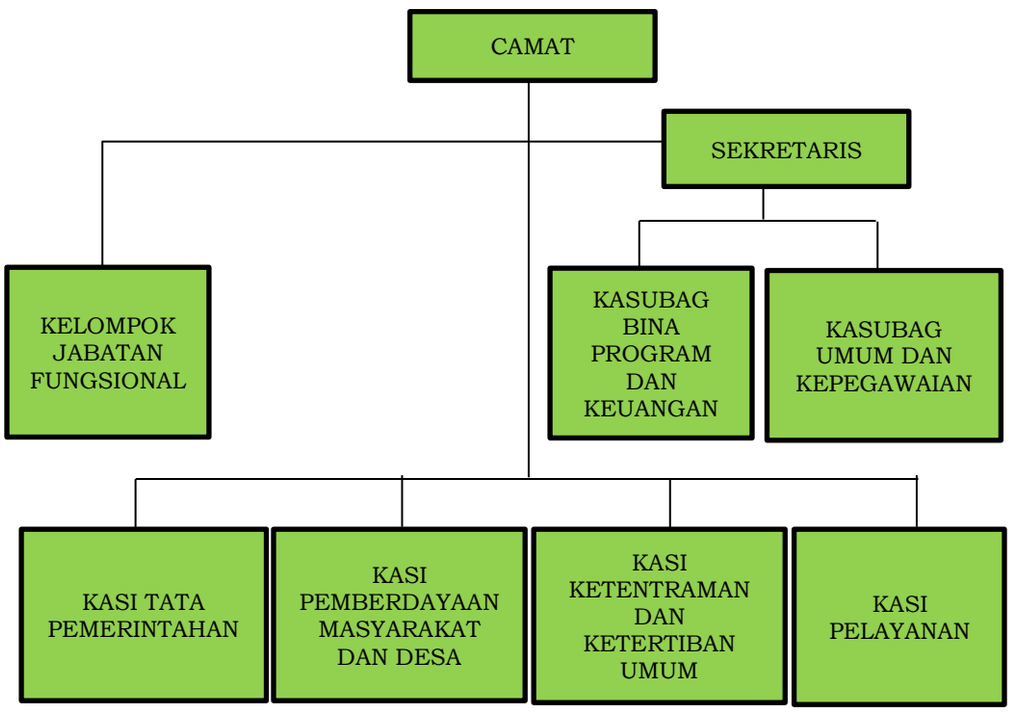

Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang

https://jdih.pemalangkab.go.id

ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

A. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Camat mempunyai uraian tugas :

1. Mengarahkan penyusunan dokumen perencanaan kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan organisasi, perencanaan partisipatif dan perencanaan yang lebih tinggi dan ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Merumuskan kebijakan kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Merumuskan inovasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
4. Mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan kecamatan, meliputi kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan umum dan kesekretariatan sesuai dengan tugas fungsi dan pedoman pelaksanaan agar tepat sasaran dan tujuan;
5. Mengarahkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan dengan melalui bimbingan, supervisi, fasilitasi dan evaluasi guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan;
6. Mengarahkan penyediaan dan pelayaan informasi publik serta penyusunan data dan informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
7. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsinya guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh PD kabupaten yang ada di kecamatan sesuai dengan petunjuk pimpinan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
9. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan Peraturan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
10. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Merumuskan laporan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kerja organisasi.

https://jdih.pemalangkab.go.id

B. Sekretaris Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan kesekretariatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian sesuai dengan kebituhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
5. Mengoordinasikan penyusunan kondep inovasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
9. Melaksanakan tugas dan kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

a. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Menyusun konsep dokumen perencanaan Kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan oprganisasi, perencanaan partisipatif, dan perencanaanyang lebih tinggi guna dirumuskan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

https://jdih.pemalangkab.go.id

4. Menyusun konsep laporan capaian kinerja Kecamatan yang meliputi LkjIP, laporan pelaksanaan APBD dan laporan kinerja lain berdasarkan Renja dan realisasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban;
5. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib adminstrasi;
6. Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan keuangan;
7. Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi LRA, LO, LPE, neraca dan CaLK serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;
8. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
10. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kecamata sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepasa pimpinan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai sengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengelola kegiatan administrasi surat menyurat, kepegawaian, penataan arsip, dokumentas, dan kearsipan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
4. Mengelola kegiatan kerumahtanggaan meliputi penyediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, pelayanan tamu dinas dan fasilitasi

https://jdih.pemalangkab.go.id

penyelenggaraan rapat dinas sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

5. Mengelola administrasi barang milik daerah yang meliputi penyusunan analisa kebutuhan dan pemeliharaan barang, penatausahaan barang, dan penyusunan administrasi barang lainnya sesuai dengan peraturan pengelolaan barang milik daerah guna tertib administrasi;
6. Mengelola kegiatan ketatalaksanaan meliputi penyusunan standart dan prosedur kerja sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Mengelola kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi penyediaan dan pelayanan informasi publik, penyusunan data informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian, pengaturan tata tempat dan tata acara serta kegiatan kehumasan dan keprotokolan lain sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

C. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta, dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan memeriksa berkas yang diajukan kepala desa sebagai bahan konsultasi kepada pimpinan guna disahkan oleh pimpinan;
5. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan melalui fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, fasilitasi pemberian tunjangan perangkat desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, fasilitasi penataan, pemanfaatan dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;

6. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Seksi Tata Pemerintahan meliputi data monografi desa, data perangkat desa dan data terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
8. Menyusun konsep motivasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

D. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas:

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, keagamaan, pembinaan kesehatan, keluarga berencana, organisasi perempuan, pendidikan, pemuda dan olahraga dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan sosial desa melalui fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pembangunan desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjaama desa dengan pihak ketiga, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, koordinasi pendampingan desa, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial guna tertib administrasi dan kelancaran dan penyelenggaraan pemerintahan desa;

https://jdih.pemalangkab.go.id

5. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dengan melibatkan stakeholder terkait demi tercapainya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran;
6. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan dan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawabkan kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

E. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan meliputi fasilitasi pengaduan masyarakat, kejadian musibag, bencana umum atau kejadian luar biasa lainnya serta upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lainnya dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan pemuka agama/tokoh masyarakat serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau desa/kelurahan serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna tegaknya peraturan;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah yang ada di wilayah kecamatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dan/atau swasta dan/atau pihak terkait lainnya sesuai dengan prosesur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna

https://jdih.pemalangkab.go.id

keamanan dan terpeliharanya prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah;

6. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan yang bergerak di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
7. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kebutuhan informasi publik;
9. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

F. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan kegiatan koordinasi terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan dan kabupaten, pemerintah desa/kelurahan, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep rencana operasional dan standar pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
5. Melaksanakan kegiatan fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan di bidang perizinan, non perizinan, administrasi pertanahan dan pelayanan administrasi lainnya sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dan pemeriksaan dokumen/berkas permohonan, cek lokasi apabila disyaratkan, pengesahan hingga penyampaian kembali dokumen/berkas kepada pemohon guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
6. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan prosedur dan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;

https://jdih.pemalangkab.go.id

7. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tercapainya kepuasan masyarakat;
8. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undanganguna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
9. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
10. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Watukumpul

Sumber daya Kecamatan Watukumpul sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

a. Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Jumlah pegawai di Kecamatan Watukumpul dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyakatan sosial tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.
Pegawai Kecamatan Watukumpul

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Golongan				Jumlah
				I	II	III	IV	
1	Camat	1	-	-	-	-	1	1
2	Sekcam	-	-	-	-	-	-	-
3	Kasubag	1	-	-	-	1	-	1
4	Kasi Kecamatan	3	-	-	-	3	-	3
5	JFU Kecamatan	8	1	-	5	4	-	9
6	JFT Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
7	Non ASN Kecamatan	2	9	-	-	-	-	11
Jumlah		15	10	-	5	8	1	25

Sumber : Sekretariat Kecamatan Watukumpul*, 2025*

Pegawai Kecamatan Watukumpul berjumlah 25 orang, meliputi 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Watukumpul dominan laki-laki yaitu sebanyak 60,00 %. Agar kecamatan Watukumpul menerapkan responsif gender, untuk perekrutan tenaga non ASN selanjutnya disarankan berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya jumlah pegawai berdasar golongan, meliputi non ASN sebanyak 11 orang, golongan II sebanyak 5 orang,

https://jdih.pemalangkab.go.id

golongan III sebanyak 8 orang dan golongan IV sebanyak 1 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Watukumpul didominasi oleh ASN sebanyak 56,00 % dan dominan bergolongan III yaitu sebanyak 32,00 %.

Tabel 2.2.
Data Pegawai Berdasar Diklat Kepemimpinan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Diklatpim III	1	1	-
2	Diklatpim IV	1	1	-
3	ADUM	-	-	-
4	SEPADA	-	-	-
5	Struktural yang belum diklat	3	3	-
Jumlah		5	5	-

Sumber : Sekretariat Kecamatan Watukumpul*., 2025*

Jumlah pegawai berdasarkan diklat kepemimpinan pada Kecamatan Watukumpul, yaitu 1 orang sudah mengikuti Diklatpim III, 1 orang sudah mengikuti Diklatpim IV dan 3 orang belum mengikuti diklat kepemimpinan, hal ini disebabkan masih menunggu penyelenggaraan diklat dari instansi yang berwenang.

Tabel 2.3.
Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
	ASN			
1.	Pasca Sarjana (S2)	-	-	-
2.	Sarjana (S1)	11	10	1
3.	Diploma	-	-	-
4.	SLTA	1	1	-
5.	SLTP	2	2	-
	Jumlah	14	13	1
	Non ASN			
1.	Pasca Sarjana (S2)	-	-	-
2.	Sarjana (S1)	7	1	6
3.	Diploma	-	-	-
4.	SLTA	4	2	2
	Jumlah	11	3	8
	Jumlah Total	25	16	9

Sumber : Sekretariat Kecamatan Watukumpul*, 2025*

Jumlah pegawai Kecamatan Watukumpul berdasar tingkat pendidikan yaitu Sarjana (S1) sebanyak 11 orang, SLTA sebanyak 1 orang, dan SLTP sebanyak 2 orang sehingga dapat disimpulkan bahwa secara kualitas SDM di Kecamatan Watukumpul sudah tercukupi, yaitu dengan dominansi berpendidikan S1 sebanyak 78,57 %.

Tabel 2.4.
Data Pegawai Berdasar Tingkat Eselon

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	III A	1	1	-
2	III B	-	-	-
3	IV A	3	3	-
4	IV B	1	1	-
Jumlah		5	5	-

Sumber : Sekretariat Kecamatan Watukumpul*., 2025*

Jumlah pegawai Kecamatan Watukumpul berdasarkan tingkat eselon, yaitu Eselon III A sebanyak 1 orang, Eselon IV A sebanyak 3 orang, Eselon IV B sebanyak 1 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Kecamatan Watukumpul berdasarkan tingkat eselon dominan esselon IVA yaitu sebanyak 60 %.

Untuk meningkatkan kapasitas SDM yang ada, Kecamatan Watukumpul telah melaksanakan kegiatan pengembangan SDM yang tersaji pada tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.5.
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kecamatan Watukumpul Tahun 2023-2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun ke		Realisasi Tahun ke		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Pelaksanaan ke		Uraian Permasalahan
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	6.500.000	12.700.000	6.493.042	12.656.000	99,89	99,65	
	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.500.000	12.700.000	6.493.042	12.656.000	99,89	99,65	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	6.500.000	1.999.940	6.488.000	100,00	99,82	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	3.700.000	1.993.102	3.700.000	99,66	100,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.468.000	100,00	98,72	
2.	**Program Penyelenggaraa Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	5.000.000	10.000.000	5.000.000	9.943.000	100,00	99,43	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000	10.000.000	5.000.000	9.943.000	100,00	99,43	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000	10.000.000	5.000.000	9.943.000	100,00	99,43	
3.	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	20.000.000	40.000.000	19.982.000	39.152.600	99,91	97,88	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	20.000.000	40.000.000	19.982.000	39.152.600	99,91	97,88	

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun ke		Realisasi Tahun ke		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Pelaksanaan ke		Uraian Permasalahan
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.000.000	40.000.000	19.982.000	39.152.600	99,91	97,88	
4.	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	0	20.000.000	0	19.950.000	0	99,75	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	20.000.000	0	19.950.000	0	99,75	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0	20.000.000	0	19.950.000	0	99,75	
5.	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	23.000.000	70.832.000	23.000.000	70.731.500	100,00	99,86	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	23.000.000	70.832.000	23.000.000	70.731.500	100,00	99,86	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	13.000.000	60.832.000	13.000.000	60.731.500	100,00	99,83	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	
6.	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	31.607.000	60.482.000	31.607.000	60.482.000	100,00	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun ke		Realisasi Tahun ke		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Pelaksanaan ke		Uraian Permasalahan
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.607.000	60.482.000	31.607.000	60.482.000	100,00	100,00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12.982.000	20.482.000	12.982.000	20.482.000	100,00	100,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.000.000	25.000.000	10.000.000	25.000.000	100,00	100,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8.625.000	15.000.000	8.625.000	15.000.000	100,00	100,00	
	Jumlah	86.107.000	214.014.000	86.082.042	212.915.100	99,97	99,49	

https://jdih.pemalangkab.go.id

b. Sarana dan Prasarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Kecamatan Watukumpul dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6.
Inventaris Aset Kecamatan Watukumpul

No	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Jumlah Harga (Rp)
					Baik	Sedang	Rusak	
1	01		Tanah					
		01	Tanah	1	1			83.600.000,-
			Jumlah KIB A	1	1			83.600.000,-
2	01		Peralatan dan Mesin					
		02	Alat-alat Besar	1				13.000.000,-
		03	Alat-alat Angkutan	11				490.915.430,-
		04	Alat Kantor & Rumah Tangga	63				182.853.070,-
		05	Alat Studia & Alat Komunikasi	22				100.605.650,-
		06	Peralatan Personal Komputer	37				168.087.700,-
			Jumlah KIB B					955.461.850,-
3	03		Gedung dan Bangunan					
		11	Bangunan Gedung					1.878.626.300,-
		12	Monumen					0,-
			Jumlah KIB C					1.878.626.300,-
4	04		Jalan, Irigasi dan Jaringan					
		13	Jalan & Jembatan					0,-
		14	Bangunan Air/Irigasi					0,-
		15	Instalasi					0,-
		16	Jaringan					3.000.000,-
			Jumlah KIB D					3.000.000,-
5	05		Aset Tetap Lainnya					
		17	Buku dan Perpustakaan					0,-
		18	Barang Bercorak Kebudayaan					0,-
		19	Hewan, Ternak dan Tanaman					0,-
			Jumlah KIB E					0,-
6	06		Konstruksi dalam Pengerjaan					0,-
			Jumlah KIB F					0,-
			Jumlah Total					2.920.688.150,-

Sumber : Sekretariat Kecamatan Watukumpul*., 2025*

Berdasar tabel 2.6, sarana dan prasarana perkantoran yang dimiliki oleh Kecamatan Pemalang sudah cukup dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

https://jdih.pemalangkab.go.id

c. Administrasi Kewilayahan

Terdapat 15 desa di Kecamatan Watukumpul dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.7.
Administrasi Kewilayahan Kecamatan Watukumpul

No	Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT	Jumlah Perangkat Desa	Jumlah Linmas	Ket
1	Tundagan	5	5	20	12	25	
2	Tlagasana	8	8	24	15	51	
3	Bongas	3	6	29	11	37	
4	Cikadu	5	6	34	11	49	
5	Cawet	3	3	24	11	22	
6	Medayu	4	4	12	11	16	
7	Pagelaran	3	8	16	10	40	
8	Bodas	4	4	18	12	20	
9	Gapura	3	3	15	11	20	
10	Jojogan	3	5	23	10	26	
11	Majalangu	5	9	48	10	19	
12	Watukumpul	3	4	22	11	31	
13	Tambi	1	4	16	10	26	
14	Majakerta	5	5	30	11	30	
15	Wisnu	3	3	13	11	22	
	Jumlah	58	77	344	167	434	

Sumber : Sekretariat Kecamatan Watukumpul*, 2025*

Kecamatan Watukumpul terdiri dari 15 desa, 344 RT dan 77 RW. Untuk menjaga ketentraman dan ketertiban wilayah, Kecamatan didukung oleh 434 personil Linmas.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul

Gambaran kinerja pelayanan Kecamatan Watukumpul Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan Tabel 2.9 berikut :

Tabel 2.8.a

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang

No	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun					Catatan Analisis
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks		√		NA	82	84	86	88	80	82	90,21	90,48	90,66	NA	100,00	107,39	105,21	103,02	
2	Cakupan layanan kecamatan	%		√		NA	93,33	94,67	94,67	96,00	93,33	93,33	94,67	94,67	96,00	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks				NA	35,52	35,82	36,32	36,82	35,32	28,10	39,53	0	0	NA	79,11	110,36	0,00	0,00	
4	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Indeks	-		-	NA	34,80	35,30	35,80	36,30	34,30	41,63	48,40	59,05	63,76	NA	119,63	137,11	164,94	175,65	
5	Persentase pelayanan publik yang tersedia	%				NA	93,33	93,33	93,33	93,33	93,33	90,56	93,33	93,33	93,33	NA	97,03	100,00	100,00	100	
6	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%	-	-	-	NA	100	100	100	100	100	95,69	100	100	100	NA	95,69	100,00	100,00	100	
7	Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%	-	-	-	NA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	NA	100,00	100,00	100,00	100	
8	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	-	-	-	NA	100	100	100	100	100	0	100	100	100	NA	0,00	100,00	100,00	100	
9	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	-	-	-	NA	73,33	80	80	86,67	73,33	72,63	80	80	86,67	NA	99,05	100,00	100,00	100	

Sumber : Kecamatan Watukumpul*, 2025*

https://jdih.pemalangkab.go.id

Berdasarkan tabel 2.8.a dapat diketahui pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Watukumpul selama tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Melebihi target, meliputi :
   - Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan (2022 – 2024);
   - Indeks Reformasi Birokrasi (2022);
   - Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2021, 2022, 2023 dan 2024).

   Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :

   a. Komitmen dari semua pihak;
   b. Sarana dan prasarana yang memadai;
   c. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM.
2. Memenuhi target, meliputi :
   - Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan kecamatan (2021);
   - Cakupan layanan kecamatan (2021 – 2024);
   - Persentase pelayanan publik yang tersedia (2022 – 2024);
   - Persentase Masyarakat desa dan kelurahan yang aktif (2022 – 2024);
   - Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan (2021 – 2024);
   - Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani (2022 – 2024);
   - Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik (2022 – 2024).

   Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :

   a. Komitmen dari semua pihak;
   b. Sarana dan prasarana yang memadai;
   c. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM;
   d. Komunikasi dan koordinasi yang intens antar instansi
3. Tidak memenuhi target, meliputi :
   - Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan (2020)
   - Cakupan layanan kecamatan (2020)
   - Indeks Reformasi Birokrasi (2020, 2021, 2023-2024), yang disebabkan oleh : (1) Kurangnya komitmen dari berbagai pihak; (2) Pada tahun 2023-2024 belum dilakukannya evaluasi oleh inspektorat.
   - Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (2020)
   - Persentase pelayanan publik (2020, 2021)
   - Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif (2020, 2021)
   - Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan (2021)
   - Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani (2020, 2021)
   - Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik (2020, 2021), yang disebabkan oleh : (1) Masih ada beberapa desa yang kurang memahami tentang pembuatan kelengkapan administrasi desa; (2) Masih kurangnya SDM yang memadai; dan (3) Pembinaan yang kurang terjadwal.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.8. b
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Sesuai Bab II RPJMD tahun 2025 – 2029

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	%	100	100	100	100	100
2	Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	%	80	80	100	100	70
3	Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan	%	100	100	100	100	100
4	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi	%	66,67	80	100	100	100
5	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	%	100	100	100	100	100
6	Jumlah potensi konflik	kasus	0	0	0	0	0
7	Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik	%	73,33	73,33	100	80	86,67

Sumber : Kecamatan Watukumpul, 2025

Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani selama kurun waktu tahun 2020-2024 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada pengaduan masyarakat di kecamatan dapat ditangani dengan baik dan tepat waktu.

Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat selama kurun waktu tahun 2020-2024 adalah 70% - 100%. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya kendala yang terjadi di kecamatan, mulai dari kurang siapnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas serta kurangnya dukungan dari PD terkait.

Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan selama kurun waktu tahun 2020-2024 sudah sangat baik sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepedulian dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang diselenggarakan mulai dari tingkat desa sampai kecamatan sudah sangat tinggi dan perlu untuk terus dipertahankan.

Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi selama kurun waktu tahun 2020-2024 yaitu sebesar 66,67% - 100%. LKD merupakan mitra kecamatan dalam pembangunan kecamatan sehingga perlu untuk difasilitasi kegiatannya.

Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani selama kurun waktu tahun 2020-2024 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada gangguan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan dapat ditangani dengan baik.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pada tahun 2020 - 2024 tidak terdapat potensi konflik. Artinya tidak ada perbedaan pendapat dan kesalahpahaman yang berlarut larut hingga menjadi suatu potensi konflik. Sebelum menjadi potensi konflik sudah dapat diselesaikan dengan baik lewat koordinasi di tingkat kecamatan.

Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik dalam kurun waktu tahun 2020-2024 capaian tersebut masih jauh dari target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya kendala yang terjadi di kecamatan, mulai dari kurang siapnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas serta kurangnya dukungan dari PD terkait.

Selain indikator pada Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2020-2024 dan pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 terdapat pula indikator kinerja berdasar SDG's, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021. Namun, untuk Kecamatan Watukumpul tidak terdapat indikator kinerja dari ketiga regulasi tersebut sehingga ditulis NIHIL.

Tabel 2.8. c
Pencapaian Kinerja Pelayanan KecamatanWatukumpul Kabupaten Pemalang Berdasarkan SDGs

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2	**NIHIL**					
3						

Sumber : Kecamatan Watukumpul*, 2025*

Tabel 2.8. d
Pencapaian Kinerja Pelayanan KecamatanWatukumpul Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2	**NIHIL**					
3						

Sumber : Kecamatan Watukumpul*, 2025*

Tabel 2.8. e
Pencapaian Kinerja Pelayanan KecamatanWatukumpul Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2	**NIHIL**					
3						

Sumber : Kecamatan Watukumpul, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 2.9.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program pelayanan adminiatrasi perkantoran	273.790.000					271.765.000					99,26					NA	NA
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	387.305.000					385.375.000					99,50					NA	NA
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	7.970.000					7.970.000					100,00					NA	NA
Progran peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	36.045.000					36.045.000					100,00					NA	NA
Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran	131.625.000					131.606.000					99,99					NA	NA
Program pengembangan kewiliyahan	94.246.000					93.729.000					99,45					NA	NA
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		2.633.095.000	2.474.664.000	2.310.681.000	2.481.357.500		2.493.981.827	2.286.456.784	2.185.329.895	2.154.913.415		94,72	92,39	94,58	86,84	-5,26	-14,14
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		36.000.000	51.000.000	26.000.000	61.000.000		36.000.000	50.572.000	25.988.935	46.264.019		100,00	99,16	99,96	75,84	127,26	69,88
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		62.724.000	75.000.000	55.275.000	78.500.000		62.460.000	74.250.000	55.257.000	77.557.600		99,58	99,00	99,97	98,80	35,29	33,65
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		-	10.000.000	5.000.000	40.000.000		-	10.000.000	5.000.000	39.177.400		0,00	100,00	100,00	97,94	650,00	633,55
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		55.000.000	45.000.000	27.140.000	80.832.000		48.812.000	45.000.000	27.140.000	80.731.500		88,75	100,00	100,00	99,88	139,96	149,96
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		127.000.000	174.375.000	110.736.500	200.806.500		124.586.000	174.374.000	110.506.550	182.588.000		98,10	100,00	99,79	90,93	82,15	68,56

Sumber : Kecamatan Watukumpul, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id

Berdasar tabel 2.9, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu tahun 2020-2024 rasio antara realisasi dan anggaran Kecamatan Watukumpul, yaitu dengan rata-rata sebesar 99,70% pada tahun 2020 menjadi sebesar 91,71% pada tahun 2020. Hal ini berarti dana yang sudah dianggarkan dapat terserap secara optimal untuk pelaksanaan pelayanan Kecamatan Watukumpul. Besaran anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Watukumpul selama kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 171,57%. Besaran realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2020-2024 juga cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 156,91%. Peningkatan anggaran menjadi salah satu pendorong dapat tercapainya target kinerja pelayanan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Watukumpul khususnya dalam melaksanakan pelayanan, maka kelompok sasaran layanan Kecamatan Watukumpul antara lain sebagai berikut:

a. Pemerintah Desa
b. Masyarakat
c. Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Watukumpul juga menjalin koordinasi dengan *stakeholder* terkait seperti Kepolisian Sektor, Komando Rayon Militer dan Lembaga Masyarakat di tingkat Kecamatan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Kecamatan Watukumpul diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab, tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan agar dapat di identifikasi berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029 guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah. Pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Watukumpul dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.10
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Watukumpul

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia	Masih terbatasnya jenis data pemerintahan yang dipublikasi	Masih terbatasnya data pemerintahan yang tersedia
		Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat	Masih terdapat pengajuan izin non usaha
			Masih terdapat ketidaksesuaian data masyarakat miskin

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Masih terdapat kewenangan lain yang dilimpahkan
2	Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan	Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Masih rendahnya tingkat partisipasi Musrenbang Kecamatan
			Masih rendahnya kapasitas pengelola lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan
3	Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	Masih rendahnya linmas yang mempunyai kompetensi	Masih terbatasnya Linmas yang mengikuti pelatihan
		Belum optimalnya koordinasi penegakkan Perda/Perbup	Belum optimalnya koordinasi monitoring penegakkan Perda/Perbup
4	Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	Masih banyak masyarakat yang belum paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Belum optimalnya peringatan hari besar nasional dan hari besar agama sebagai upaya menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
			Masih minimnya pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
			Belum optimalnya penanganan potensi konflik sosial
			Perlu ditingkatkannya koordinasi antar pimpinan di Kecamatan
5	Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Masih banyak desa yang belum mampu melaksanakan administrasi tata pemerintahan desa dengan tertib
			Masih banyak desa yang belum mampu mengelola keuangan desa dan mendayagunakan aset desa
			Belum optimalnya pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Ada desa yang mengadakan pemilihan kepala desa
			Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
			Ada desa yang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
6	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja	Belum tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan PD
			Belum optimalnya penyusunan dokumen penganggaran PD
			Belum optimalnya penyusunan laporan evaluasi kinerja PD
		Belum optimalnya pengadministrasian keuangan	Perlunya penyediaan gaji dan tunjangan ASN setiap bulan
			Belum optimalnya penyusunan laporan keuangan PD
7	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Belum optimalnya pengadministrasian Barang Milik Daerah (BMD)	Belum optimalnya penyusunan perencanaan kebutuhan BMD
			Belum optimalnya penyusunan laporan BMD
		Masih rendahnya kapasitas SDM	Minimnya kegiatan peningkatan kapasitas
		Belum optimalnya penyediaan layanan administrasi umum	Belum tercukupinya sarana dan prasarana kantor yang dibutuhkan
			Penataan arsip belum sesuai ketentuan
		Belum optimalnya penyediaan jasa penunjang untuk memperlancar pelaksanaan tugas	Masih kurangnya penyediaan jasa penunjang pelaksanaan tugas
			Jumlah ASN belum mencukupi kebutuhan
		Belum optimalnya pemeliharaan BMD	Terdapat kendaraan dinas yang harus dipelihara
			Terdapat mebel yang harus dipelihara
			Terdapat peralatan dan mesin yang harus dipelihara
			Terdapat gedung kantor yang harus dipelihara

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Terdapat sarpras pendukung gedung kantor yang harus dipelihara

2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berlangsung dalam jangka menengah/panjang. (Permendagri 86 tahun 2017). Isu strategis Kecamatan Watukumpul dirumuskan dengan mempertimbangkan isu strategis global, Nasional dan Provinsi, dan memperhatikan potensi, peluang dan tantangan yang ada di Kecamatan Watukumpul selama kurun waktu tahun 2025-2029. Isu Global, Nasional, dan Provinsi Jawa Tengah dan isu strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pemalang untuk Kecamatan Watukumpul adalah sebagai Berikut:

Tabel 2.11
Isu Strategis Kecamatan Watukumpul

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pelayanan Publik	Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia		Krisis Lapangan Pekerjaan	Masih tingginya kesenjangan Pembangunan antar wilayah karena persebaran ekonomi yang tidak merata antara utara dan Selatan, barat dan timur (Bali), serta daerah kepulauan	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Belum Optimalnya Pelayanan Publik
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan					
Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan		Masyarakat damai		Kekuatan budaya	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan					
Pembinaan dan Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan	Belum optimalnya desa bertata kelola pemerintahan baik		Krisis Utang	Belum optimalnya Upaya pengurangan Tingkat pengangguran	Penurunan Tingkat pengengguran	Belum Optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja			Tata Kelola pemerintahan belum optimal	Tata Kelola pemerintahan yang dinamis	
	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi					

2.3 Telaahan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Penelaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Watukumpul yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah :

“PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA”

Visi ini memiliki pembentuk kata :

1. **Bersih** Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan
2. **Cakap** dimaknai memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
3. **Handal** dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.
4. **Mulya** Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

1. **Misi 1 Resik**: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih.
   Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik
2. **Misi 2 Hijau:** meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sector unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau, yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan) yang ramah lingkungan, industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM dimasyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.
3. **Misi 3 Apik**: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penaatan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dari Desa.
4. **Misi 4 Peduli**: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi ewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal;
5. **Misi 5 Silaturahmi**: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, dan saling menghormati dan teposliro
6. **Misi 6 Organisatoris**: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan *Good Governance*, *Clean Governance* dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.
7. **Misi 7 Digitalisasi**: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi
8. **Misi 8 Ikhlas**: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkan kearifan dan budaya lokal.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB III

TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Kecamatan Watukumpul dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing dibidang pelayanan publik, maka Kecamatan Watukumpul harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas dibidang pelayanan publik, Kecamatan Watukumpul secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat secara umum.

3.1 Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Watukumpul selama tahun 2025–2029 adalah "**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah kecamatan**". Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Watukumpul sebagai perangkat daerah yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, bertujuan untuk meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah kecamatan. Tujuan tersebut diukur dengan indikator jumlah desa/kelurahan mandiri di kecamatan.

3.2 Sasaran

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Watukumpul dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Watukumpul selama tahun 2025-2029, adalah "**Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat**". Sasaran tersebut diukur dengan indikator nilai SKM dan Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri yang diperoleh dari jumlah desa mandiri dibagi jumlah seluruh desa di kecamatan dikali 100%.

Adapun teknis merumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Watukumpul dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.1
Teknis merumuskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Watukumpul

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntable, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah kecamatan		Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan	3	3	4	4	4	4	4
		Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Nilai SKM	90,66	91,05	91,10	91,15	91,20	91,25	91,30
			Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri	20,00	20,00	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67

https://jdih.pemalangkab.go.id

3.3 Strategi

Strategi yang dilakukan oleh Kecamatan Watukumpul guna mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Watukumpul dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM Kecamatan Watukumpul
2. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas
3. Meningkatnya kualitas pembangunan desa
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hidup berdampingan
5. Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik

Dalam rangka mencapai strategi di atas maka pentahapan strategi setiap tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tahapan Rencana Strategis

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan peran serta masyarakat desa dan lembaga dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kecamatan dalam pembangunan	Mempercepat pembangunan Kecamatan Watukumpul untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah

3.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategis yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025 – 2030 memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Pemalang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Watukumpul

NO	OPERASIONALISASI NPSK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum	Peningkatan kualitas perencanaan daerah di fokuskan pada transparansi, akuntabilitas perencanaan, dan sinergitas dok pusat dan propinsi Peningkatan kualitas digitalisai pelayanan pemerintahan di fokuskan pada peningkatan tata kelola arsitektur SPBE, mendorong kualitas SMART City dan kualitas layanan aduan	Penguatan sistem perencanaan, pelayananan pemerintahan dan pengukuran kinerja	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	OPERASIONALISASI NPSK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Peningkatan kualitas pelayanan publik di fokuskan pada pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan kepuasan pada masyarakat		
2	Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Pengembangan industri kecil menengah dengan penguatan sentra/kluster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital Peningkatan pertumbuhan usaha mikro dengan penguatan kelembagaan, akses permodalan melalui peran koperasi	Pengembangan pelatihan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan UMKM	
3	Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan konduktivitas wilayah dengan peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama dan pemahaman wawasan kebangsaan	Meningkatkan pelatihan limas dan pembinaan masyarakat terkait keamanan dan ketertiban	
4	Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa di fokuskan eprocurements, kualitas sarana dan prasarana	Penguatan koordinasi dan supervisi dar	
5	Membina dan Mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa	Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan difokuskan pada peningktan indeks desa, peningkatan peran BUMDes dalam pembangunan daerah, peningkatan pembinaan dan pengawasan kecamatan dalam pembangunan desa/kelurahan dan pengembangan kerjasama antar dan pengembangan kerjasama antar desa	Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa	

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Watukumpul

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Watukumpul yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029 :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
   3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
      b. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
   4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
      b. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
      c. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
   5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
      g. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
   6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id

a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
   a. Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
   b. Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
   c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
   a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
   c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
   b. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

https://jdih.pemalangkab.go.id

c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
   a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
   b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
   c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
      a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
   2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
      a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah sesuai Penugasan Kepala Daerah
      a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
      b. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
      c. Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
      d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

F. Program Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintahan Desa
   1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
      a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
      b. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
      c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
      d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
      e. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
      f. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
      g. Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
      h. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

https://jdih.pemalangkab.go.id

i. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
j. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

4.2 Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2030 dan Kerangka Pendanaan

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Kecamatan Watukumpul selama tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.1
Rumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Watukumpul

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan				Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan		
		Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat			Nilai SKM		
					Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang	Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				tersusun sesuai regulasi			
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase Laporan/Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi	Jumlah Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Persentase Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi	Jumlah Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	Jumlah Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan RumahTangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase pelimpahan kewenangan ke kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
				Persentase dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang menunjang pelaksanaan tugas	Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang menunjang pelaksanaan tugas	Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Persentase dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang menunjang pelaksanaan tugas	Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang tersusun	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan		Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
				Persentase dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang menunjang pelaksanaan tugas	Jumlah dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Persentase laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang menunjang pelaksanaan tugas	Jumlah laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang tersusun	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum		Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				Persentase laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang menunjang pelaksanaan tugas	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang menunjang pelaksanaan tugas	Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tersusun	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	
			Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama		Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
				Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang menunjang pelaksanaan tugas	Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
					Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan PerundangUndangan	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase kesesuaian RKPDes dan RPJMDes dengan RPJMD	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Persentase dokumen fasilitasi, rekomendasi dan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang menunjang pelaksanaan tugas	Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	

https://jdih.pemalangkab.go.id

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang

Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					2.758.931.000		2.809.736.400		2.817.736.400		2.795.936.400		2.960.836.400		3.032.036.400		3.032.036.400	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan	Desa / Kelurahan	3	3		4		4		4		4		4		4		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata Kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Nilai SKM	Nilai	90,66	91,05		91,10		91,15		91,20		91,25		91,30		91,30		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
	Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri	%	20,00	20,00		26,67		26,67		26,67		26,67		26,67		26,67		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai	63,76	63,86	2.544.156.600	63,91	2.594.962.000	63,96	2.602.962.000	64,01	2.581.162.000	64,06	2.746.062.000	64,11	2.817.262.000	64,11	2.817.262.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.660.000		10.800.000		10.800.000		10.800.000		11.300.000		11.300.000		11.300.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Keluaran kegiatan	Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi	Laporan/Dokumen	14	14		14		14		14		14		14		14		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Hasil Kegiatan	Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	1.470.000	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.700.000	2	1.700.000	2	1.700.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1.700.000	1	1.700.000	1	1.700.000	1	1.700.000	1	1.700.000	1	1.700.000	1	1.700.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1.280.000	1	1.300.000	1	1.300.000	1	1.300.000	1	1.400.000	1	1.400.000	1	1.400.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1.400.000	1	1.400.000	1	1.400.000	1	1.400.000	1	1.400.000	1	1.400.000	1	1.400.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1.400.000	1	1.400.000	1	1.400.000	1	1.400.000	1	1.400.000	1	1.400.000	1	1.400.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	1.985.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	1.425.000	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.700.000	4	1.700.000	4	1.700.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.149.268.000		2.153.000.000		2.153.000.000		2.153.200.000		2.288.700.000		2.288.900.000		2.288.900.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Keluaran Kegiatan	Jumlah Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi	Laporan /Dokumen	15	15		19		19		19		19		19		19		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Hasil Kegiatan	Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	14	11/14	2.148.268.000	17/14	2.150.000.000	17/14	2.150.000.000	17/14	2.150.000.000	17/14	2.285.000.000	17/14	2.285.000.000	17/14	2.285.000.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.400.000	1	1.400.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	0	0	0	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.500.000	4	2.500.000	4	2.500.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					1.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Keluaran Kegiatan	Jumlah Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi	Laporan /Dokumen	0	2		3		3		3		3		3		3		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Hasil Kegiatan	Persentase Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					2.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Keluaran Kegiatan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	Dokumen	0	2		3		3		3		3		3		3		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Hasil Kegiatan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	25	3.000.000	25	3.000.000	25	3.000.000	25	7.000.000	25	7.000.000	25	7.000.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	25	2.000.000	45	4.000.000	45	4.000.000	45	4.000.000	45	5.000.000	45	5.000.000	45	5.000.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0	30	2.000.000	30	2.000.000	30	2.000.000	30	5.000.000	30	5.000.000	30	5.000.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Administrasi Umum Perangkat Daerah					80.299.400		98.500.000		98.500.000		98.500.000		109.900.000		109.900.000		109.900.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Keluaran Kegiatan	Jumlah Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	Dokumen	4	5		7		7		7		7		7		7		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Hasil Kegiatan	Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	5.800.000	5	5.900.000	5	5.900.000	5	5.900.000	5	6.000.000	5	6.000.000	5	6.000.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	14	5.000.000	14	5.000.000	14	5.000.000	16	6.000.000	16	6.000.000	16	6.000.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Penyediaan Peralatan RumahTangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	0	0	10	7.000.000	10	7.000.000	10	7.000.000	10	9.000.000	10	9.000.000	10	9.000.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	13	18	27.773.000	20	30.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000	22	35.000.000	22	35.000.000	22	35.000.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	5	8.566.400	5	8.600.000	5	8.600.000	5	8.600.000	6	8.900.000	6	8.900.000	6	8.900.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	35.160.000	12	38.000.000	12	38.000.000	12	38.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	4	3.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					26.850.000		32.000.000		45.000.000		22.000.000		27.000.000		95.000.000		95.000.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Keluaran Kegiatan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Unit	0	4		6		6		6		6		9		9		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Hasil Kegiatan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	%	0	100		100		100		100		100		100		100		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	1	25.000.000	0	0	0	0	1	30.000.000	1	30.000.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	2	7.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	4	12.000.000	4	12.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	2	19.850.000	3	22.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	35.000.000	1	35.000.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					201.059.200		206.382.000		206.382.000		207.382.000		208.382.000		208.382.000		208.382.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Keluaran Kegiatan	Jumlah Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan	4	4		4		4		4		4		4		4		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Hasil Kegiatan	Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	4.231.200	12	4.500.000	12	4.500.000	12	4.500.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	36	24.246.000	36	24.500.000	36	24.500.000	36	24.500.000	36	25.000.000	36	25.000.000	36	25.000.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	168.582.000	12	173.382.000	12	173.382.000	12	173.382.000	12	173.382.000	12	173.382.000	12	173.382.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					73.020.000		83.280.000		78.280.000		78.280.000		80.780.000		83.780.000		83.780.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Keluaran Kegiatan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Unit	40	26		29		28		28		28		29		29		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Hasil Kegiatan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	3	47.780.000	3	47.780.000	3	47.780.000	3	47.780.000	3	47.780.000	3	47.780.000	3	47.780.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	10	2.500.000	10	2.500.000	10	2.500.000	10	2.500.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	22	11	7.790.000	11	8.000.000	11	8.000.000	11	8.000.000	11	8.000.000	11	8.000.000	11	8.000.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	3	2	14.950.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Dipelihara/Direhabilitasi																		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	3	10.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	3	8.000.000	3	8.000.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Program Penyelenggaraa Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelimpahan kewenangan ke kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	%	70	70	28.137.200	70	28.137.200	70	28.137.200	70	28.137.200	70	28.137.200	70	28.137.200	70	28.137.200	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					5.561.400		5.561.400		5.561.400		5.561.400		5.561.400		5.561.400		5.561.400	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun	Dokumen	1	3		2		2		2		2		2		2		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Hasil Kegiatan	Persentase dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang menunjang pelaksanaan tugas	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	3	5.561.400	2	5.561.400	2	5.561.400	2	5.561.400	2	5.561.400	2	5.561.400	2	5.561.400	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					10.675.800		10.675.800		10.675.800		10.675.800		10.675.800		10.675.800		10.675.800	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun	Dokumen	8	8		8		8		8		8		8		8		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Hasil Kegiatan	Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang menunjang pelaksanaan tugas	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	2	2	2.270.000	2	2.270.000	2	2.270.000	2	2.270.000	2	2.270.000	2	2.270.000	2	2.270.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	2	5.275.800	2	5.275.800	2	5.275.800	2	5.275.800	2	5.275.800	2	5.275.800	2	5.275.800	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4	3.130.000	4	3.130.000	4	3.130.000	4	3.130.000	4	3.130.000	4	3.130.000	4	3.130.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					11.900.000		11.900.000		11.900.000		11.900.000		11.900.000		11.900.000		11.900.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang tersusun	Dokumen	801	801		602		602		602		602		602		602		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Hasil Kegiatan	Persentase dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang menunjang pelaksanaan tugas	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	800	800	5.000.000	600	5.000.000	600	4.900.000	600	4.900.000	600	5.000.000	600	5.000.000	600	5.000.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	1	1	6.900.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.800.000	1	4.800.000	1	4.800.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	0	0	0	1	1.900.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.100.000	1	2.100.000	1	2.100.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	%	100	100	54.768.500	100	54.768.500	100	54.768.500	100	54.768.500	100	54.768.500	100	54.768.500	100	54.768.500	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					54.768.500		51.768.500		51.768.500		51.768.500		51.768.500		51.768.500		51.768.500	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun	Dokumen	5	6		6		6		6		6		6		6		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Hasil Kegiatan	Persentase dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang menunjang pelaksanaan tugas	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga kemasyarakatan	0	15	5.150.000	15	4.150.000	15	4.150.000	15	4.150.000	15	4.150.000	15	4.150.000	15	4.150.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	1	1	27.700.000	1	27.700.000	1	27.700.000	1	27.700.000	1	27.700.000	1	27.700.000	1	27.700.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4	21.918.500	4	19.918.500	4	19.918.500	4	19.918.500	4	19.918.500	4	19.918.500	4	19.918.500	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					0		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Keluaran Kegiatan	Jumlah laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang tersusun	Laporan	0	0		31		31		31		31		31		31		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Hasil Kegiatan	Persentase laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang menunjang pelaksanaan tugas	%	0	0		100		100		100		100		100		100		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	Lembaga kemasyarakatan	0	0	0	15	1.000.000	15	1.000.000	15	1.000.000	15	1.000.000	15	1.000.000	15	1.000.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga kemasyarakatan	0	0	0	15	1.000.000	15	1.000.000	15	1.000.000	15	1.000.000	15	1.000.000	15	1.000.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Laporan	0	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	%	100	100	17.715.000	100	17.715.000	100	17.715.000	100	17.715.000	100	17.715.000	100	17.715.000	100	17.715.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					12.525.000		12.525.000		12.525.000		12.525.000		12.525.000		12.525.000		12.525.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Keluaran Kegiatan	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun	Laporan	1	1		1		1		1		1		1		1		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Hasil Kegiatan	Persentase laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang menunjang pelaksanaan tugas	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	12.525.000	1	12.525.000	1	12.525.000	1	12.525.000	1	12.525.000	1	12.525.000	1	12.525.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					5.190.000		5.190.000		5.190.000		5.190.000		5.190.000		5.190.000		5.190.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Keluaran Kegiatan	Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tersusun	Laporan	2	2		2		2		2		2		2		2		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Hasil Kegiatan	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang menunjang pelaksanaan tugas	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	2	2	5.190.000	2	5.190.000	2	5.190.000	2	5.190.000	2	5.190.000	2	5.190.000	2	5.190.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	%	100	100	37.366.400	100	37.366.400	100	37.366.400	100	37.366.400	100	37.366.400	100	37.366.400	100	37.366.400	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					37.366.400		37.366.400		37.366.400		37.366.400		37.366.400		37.366.400		37.366.400	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun	Dokumen	5	6		8		8		8		8		8		8		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Hasil Kegiatan	Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang menunjang pelaksanaan tugas	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	30	200	29.581.400	200	28.581.400	200	28.481.400	200	28.481.400	200	28.581.400	200	28.481.400	200	28.481.400	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	30	30	1.785.000	30	1.785.000	30	1.785.000	30	1.785.000	30	1.585.000	30	1.585.000	30	1.585.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	0	0	0	2	1.000.000	2	1.100.000	2	1.100.000	2	1.200.000	2	1.300.000	2	1.300.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	2	3	6.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kesesuaian RKPDes dan RPJMDes dengan RPJMD	%	100	100	76.787.300	100	76.787.300	100	76.787.300	100	76.787.300	100	76.787.300	100	76.787.300	100	76.787.300	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					76.787.300		76.787.300		76.787.300		76.787.300		76.787.300		76.787.300		76.787.300	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun	Dokumen	128	128		120		111		110		111		109		109		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Hasil Kegiatan	Persentase dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	yang menunjang pelaksanaan tugas																		
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	15	15	5.514.500	15	5.514.500	15	6.983.500	15	6.983.500	15	5.514.500	15	5.514.500	15	5.514.500	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	15	15	10.011.000	15	10.011.000	15	10.011.000	15	10.011.000	15	10.011.000	15	10.011.000	15	10.011.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	15	15	14.632.800	15	14.632.800	15	14.632.800	15	14.632.800	15	14.632.800	15	14.632.800	15	14.632.800	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	15	15	6.625.000	15	6.625.000	15	6.625.000	15	6.625.000	15	6.625.000	15	6.625.000	15	6.625.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	11	11	4.469.000	11	4.469.000	0	0	0	0	3	4.469.000	1	4.469.000	1	4.469.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bidang Urusan / Outcome / Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	15	15	4.500.000	15	4.500.000	15	4.500.000	15	4.500.000	15	4.500.000	15	4.500.000	15	4.500.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	11	11	5.410.000	3	5.410.000	5	8.410.000	4	8.410.000	2	5.410.000	2	5.410.000	2	5.410.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	15	15	10.415.000	15	10.415.000	15	10.415.000	15	10.415.000	15	10.415.000	15	10.415.000	15	10.415.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	15	15	7.095.000	15	7.095.000	15	7.095.000	15	7.095.000	15	7.095.000	15	7.095.000	15	7.095.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	1	1	8.115.000	1	8.115.000	1	8.115.000	1	8.115.000	1	8.115.000	1	8.115.000	1	8.115.000	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kecamatan Watukumpul sudah menerapkan penganggaran berbasis pengarusutamaan gender, pada kegiatan Musrenbang Kecamatan, dimana perwakilan kelompok perempuan menjadi salah satu komponen peserta. Pengarusutamaan gender diterapkan juga dalam fasilitasi lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yaitu fasilitasi kepada PKK dan Posyandu.

Selain menentukan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan, langkah selanjutnya yaitu menentukan target pencapaian indikator kinerja terkait SDGs, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang secara berturut – turut disajikan pada tabel di bawah ini. Namun karena Kecamatan Watukumpul tidak memiliki keempat indikator tersebut, maka disampaikan Nihil sesuai tabel di bawah.

Tabel 4.3
Target Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang berdasarkan SDGs

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2	**NIHIL**							
3								
dst								

Tabel 4.4
Target Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2	**NIHIL**							
3								
dst								

Tabel 4.5
Target Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2	**NIHIL**							
3								
dst								

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.6
Target Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang berdasarkan Indikator pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2	**NIHIL**							
3								
dst								

4.3 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama, RPJMD dan pendanaan daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.7
Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
			Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
			Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
			Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
			Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan	

https://jdih.pemalangkab.go.id

			Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	

4.4 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4.3.1 Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada akhir tahun perencanaan. Berikut ini indikator kinerja Kecamatan Watukumpul sebagai berikut:

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Watukumpul

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Jumlah desa / kelurahan mandiri di Kecamatan	Desa / Kelurahan	3	3	4	4	4	4	4	
2	Nilai SKM	Nilai	90,66	91,05	91,10	91,15	91,20	91,25	91,30	
3	Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri	%	20,00	20,00	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	

4.3.2 Indikator Kinerja Kunci

Indikator kinerja kunci (IKK) adalah urusan keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Watukumpul dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.8
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Watukumpul

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NIHIL										

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Penunjang Pemerintahan Daerah untuk periode tahun 2025 - 2029. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang / urusan Penunjang Pemerintahan Daerah dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pemalang yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029. Sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L dan Renstra Pemerintah Provinsi untuk tercapainya sasaran pembangunan di Kabupaten Pemalang.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Kecamatan Watukumpul ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Watukumpul. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman bersama dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Watukumpul serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Pemalang. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Watukumpul merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan atau target kinerja sasaran Kecamatan Watukumpul. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Kecamatan Watukumpul yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Watukumpul harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKJIP) Kecamatan Watukumpul. Laporan Kinerja (LKJIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Kecamatan Watukumpul di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Watukumpul ini.

Pemalang, Oktober 2025

CAMAT WATUKUMPUL

AGUS SYARIF NURHADI, S.H
Pembina Tk. I
NIP. 19680813 199903 1 005

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

ANOM WIDIYANTORO